SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolingo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolingo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolingo Tahun 2025-2029 dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
(2) Jangka waktu efektif pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Pasal 3

(1) Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:
    a. BAB I : PENDAHULUAN
    b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
    c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
    d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
    e. BAB V : PENUTUP
(2) Penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 22 Seri G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 September 2025
BUPATI PROBOLINGGO,

ttd

MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 September 2025
SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 23 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHY CATUR INDRA B, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017

Pemerintah
Kabupaten Probolinggo

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## 2025 - 2029

Website :
dikdaya.probolinggokab.go.id

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud komitmen dan akuntabilitas kami dalam merencanakan pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun sebagai penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, serta selaras dengan visi pembangunan daerah: "Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)". Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas yang akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, masukan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, yang telah berkontribusi dalam proses perumusannya.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut seiring dengan dinamika dan tantangan pembangunan yang terus berkembang. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memajukan kebudayaan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo,  September 2025

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**Drs. DWIJOKO NURJAYADI, MM**
Pembina Utama Muda
NIP.  19690724 198903 1 004

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR TABEL ..... iii
DAFTAR GRAFIK ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Landasan Hukum ..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..... 5
1.4. Sistematika Penulisan ..... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 64
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..... 70
2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ..... 72
2.6. Penentuan Isu-Isu Strategis ..... 74
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 78
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... 78
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan ..... 81
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 88
4.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja .... 88
4.2 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, Target, dan Pendanaan Indikatif ..... 153
4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 280
BAB V PENUTUP ..... 291

## DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ..... | 23 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan ..... | 24 |
| Tabel 2.3 | Daftar Aset ..... | 25 |
| Tabel 2.4 | Daftar Sarana dan Prasarana Kerja ..... | 25 |
| Tabel 2.5 | Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) ..... | 31 |
| Tabel 2.6 | Jumlah Satuan Pendidikan SD dan MI ..... | 33 |
| Tabel 2.7 | Jumlah SMP dan MTs ..... | 36 |
| Tabel 2.8 | Jumlah Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal ..... | 37 |
| Tabel 2.9 | Jumlah Peserta Didik TK dan RA ..... | 38 |
| Tabel 2.10 | Jumlah Peserta Didik SD dan MI ..... | 40 |
| Tabel 2.11 | Jumlah Peserta Didik SMP dan MTs ..... | 41 |
| Tabel 2.12 | Jumlah Peserta Didik PAUD Dan Pendidikan Nonformal ..... | 42 |
| Tabel 2.13 | Jumlah tenaga pendidik Taman Kanak Kanak ..... | 43 |
| Tabel 2.14 | Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Dasar ..... | 44 |
| Tabel 2.15 | Jumlah Tenaga Pendidik SMP ..... | 45 |
| Tabel 2.16 | Jumlah Pendidik Pada Satuan Pendidikan Di Bawah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo ..... | 47 |
| Tabel 2.17 | Rasio Guru Terhadap Siswa ..... | 49 |
| Tabel 2.18 | Kondisi Ruang Kelas SD ..... | 50 |
| Tabel 2.19 | Kondisi Ruang Kelas SMP ..... | 51 |
| Tabel 2.20 | Proporsi Pendidik Berijazah Minimal S1/D4 ..... | 53 |
| Tabel 2.21 | Akreditasi Satuan Pendidikan ..... | 56 |
| Tabel 2.22 | Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B ..... | 58 |
| Tabel 2.23 | Daftar Sekolah Yang Berada Di Daerah Sulit ..... | 59 |
| Tabel 2.24 | Pelestarian Cagar Budaya ..... | 63 |
| Tabel 2.25 | Pemajuan Kebudayaan ..... | 63 |
| Tabel 2.26 | Pengelolaan Museum ..... | 64 |
| Tabel 2.27 | Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana ..... | 65 |
| Tabel 2.28 | Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah ..... | 66 |
| Tabel 2.29 | Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah ..... | 70 |
| Tabel 2.30 | Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ..... | 79 |

Tabel 3.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis ……..……..…… 82
Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra ……..…….. 84
Tabel 3.3 Penahapan Renstra ……..……..……..…….. 86
Tabel 3.4 Strategi Dan Arah Kebijakan ……..……..…….. 89
Tabel 4.1 Program Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ……..……. 93
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra … 102
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ……..……..……..…… 162
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Renstra ……..……..……..…… 163
Tabel 4.5 Definisi Operasional Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan ….. 167
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah ……..……..……..…….. 204
Tabel 4.7 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan …… 207
Tabel 4.8 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas 297
Tabel 4.9 Indikator Kinerja Utama ……..……..……..……. 303

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan…… 9

## DAFTAR GRAFIK


| | | |
|---|---|---|
| Grafik 2.1 | Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) ……..… | 30 |
| Grafik 2.2 | Satuan Pendidikan SD dan MI ……..……. | 33 |
| Grafik 2.3 | Satuan Pendidikan SMP dan MTs …….. | 35 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Renstra ini disusun sebagai penjabaran teknis dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029, dengan tujuan menerjemahkan visi, misi, serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam kerangka kebijakan yang terukur, implementatif, dan berorientasi pada hasil.

Visi pembangunan Kabupaten Probolinggo periode 2025–2029 adalah "**Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius, serta Eksis Berdaya Saing)".** Visi ini menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan identitas daerah sebagai pilar utama pembangunan. Dalam kerangka tersebut, sektor pendidikan dan kebudayaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengemban amanat Misi ke-3, yaitu SAE Pendidikan dan Kesehatan, dengan fokus pada pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing, serta Misi ke-5, yaitu SAE Sosial, yang menekankan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya. Komitmen ini dijabarkan secara konkret dalam bentuk tujuan dan sasaran perangkat daerah, dengan indikator kinerja yang terukur. Target utama di bidang pendidikan ditujukan pada peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan di bidang kebudayaan dititikberatkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif dipandang sebagai prasyarat untuk membentuk SDM yang unggul, religius, dan berkarakter. Sementara itu, pemajuan kebudayaan menjadi landasan untuk memperkokoh

jati diri bangsa, memelihara kearifan lokal, sekaligus menjadi modal sosial dan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Renstra ini juga dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti kesenjangan akses dan mutu layanan pendidikan antara perkotaan dan perdesaan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang perlu ditingkatkan, tingginya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS), serta tuntutan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Di sisi lain, Renstra ini mengoptimalkan peluang strategis yang tersedia, antara lain bonus demografi, perkembangan teknologi informasi, serta kekayaan budaya lokal yang menjadi aset penting pembangunan.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dokumen ini disusun secara sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Renstra ini akan menjadi panduan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dalam menetapkan prioritas pembangunan, mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, serta sebagai instrumen evaluasi kinerja untuk memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi "**Probolinggo SAE".**

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada kerangka regulasi yang komprehensif, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk menjamin keselarasan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan. Landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perencanaan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Perubahan RPJMD, Perubahan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolingo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolingo Tahun 2025-2029;

29. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

### 1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan strategis yang bersifat formal, komprehensif, sistematis, dan terukur. Dokumen ini menjadi pedoman resmi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan secara terarah, konsisten, akuntabel, dan berkesinambungan, sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan pembangunan daerah.

### 1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menerjemahkan Arah Kebijakan Daerah

   Mengoperasionalkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan

sektor pendidikan dan kebudayaan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, serta berbatas waktu (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound* – SMART).

2. Menetapkan Kerangka Kerja Pengelolaan Sumber Daya

   Menyusun kerangka kerja yang jelas, transparan, dan akuntabel untuk pengalokasian serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, maupun aset lainnya, guna menjamin terwujudnya efisiensi, efektivitas, integrasi, dan sinergi dalam pencapaian target pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

3. Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja

   Menyediakan dasar yang objektif dan terukur dalam penyusunan indikator kinerja serta mekanisme pelaporan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan.

4. Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

   Menjadi instrumen pengendali sekaligus pendorong peningkatan mutu tata kelola serta kualitas pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang merata, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan daerah.

5. Mewujudkan Keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah.

   Kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan senantiasa selaras dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

   Keselarasan ini diwujudkan melalui sinkronisasi sasaran strategis dan indikator kinerja utama pendidikan, agar tercipta kesinambungan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. Dengan demikian, setiap langkah pembangunan pendidikan di Kabupaten Probolinggo turut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional dan penguatan ekosistem pendidikan yang berdaya saing, inklusif, dan berkarakter.

Lebih lanjut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo memastikan bahwa arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah konsisten dengan dokumen perencanaan daerah, meliputi:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo 2025–2045,
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2025–2029,
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Probolinggo 2025–2029, serta
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo.

Dengan pendekatan tersebut, arah kebijakan pendidikan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tata ruang wilayah, dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Kabupaten Probolinggo.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 untuk memastikan alur pikir yang logis dan koheren, yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**: Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra.
2. **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**: Menyajikan uraian mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah (PD); sumber daya yang

dimiliki; kinerja pelayanan; tantangan dan peluang pengembangan pelayanan; identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi; serta penentuan isu-isu strategis. Seluruh analisis tersebut disusun berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Program RPJMD Kabupaten Probolinggo, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Jawa Timur, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Probolinggo..

3. **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**: Menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah serta merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapainya.
4. **BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**: Menguraikan Matrik Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja serta Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, Target, dan Pendanaan Indikatif, Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
5. **BAB V PENUTUP**: Berisi Kaidah Pelaksanaan serta Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan sektor pendidikan serta kebudayaan di daerah. Sebagai perangkat daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas membantu Bupati Probolinggo dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan provinsi

**a. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

> "Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah."

**b. Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan serta kebudayaan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum muatan lokal, termasuk pendidikan dasar, PAUD, pendidikan nonformal, pembinaan bahasa dan sastra daerah, serta pengembangan kebudayaan.
3. Evaluasi dan pelaporan kinerja layanan pendidikan, termasuk pelaksanaan program dan pencapaian target pendidikan dasar, PAUD, serta pendidikan nonformal.
4. Pengelolaan administrasi penerbitan izin dan rekomendasi satuan pendidikan, seperti pendirian sekolah, operasional lembaga pendidikan, serta penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Penataan dan pemerataan pendidik serta tenaga kependidikan di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo guna memastikan ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas.

6. Pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis (UPT) pendidikan, sekretariat, serta kelompok jabatan fungsional dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebijakan pendidikan serta kebudayaan yang sedang berjalan

**c. Struktur Organisasi**

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Susunan Organisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Probolinggo

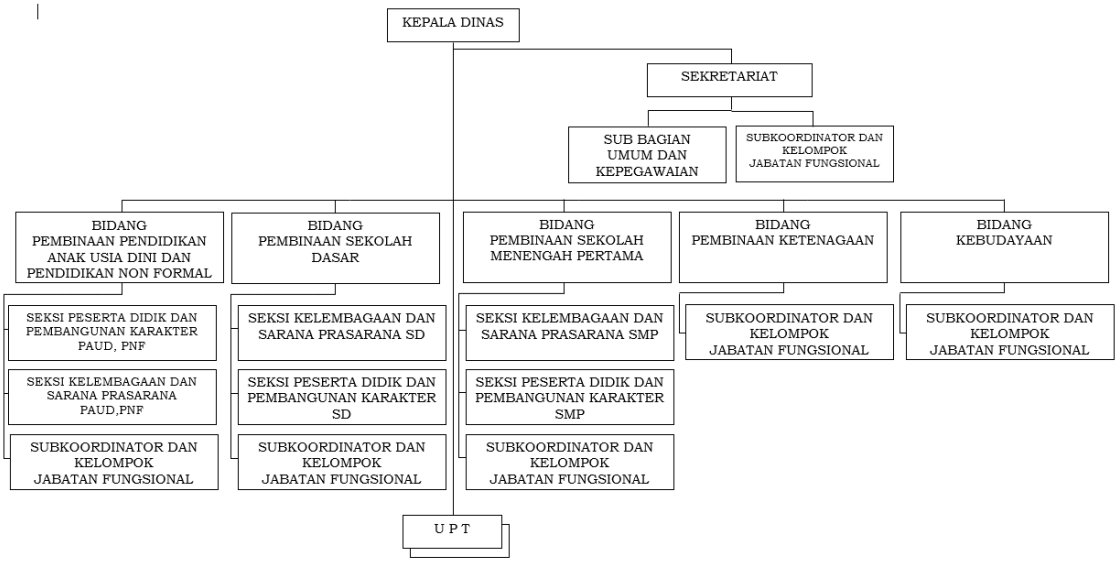


1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan tugas pembantuan dibidang

pendidikan dan Kebudayaan;

b. pengelolaan data dan informasi dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan Kebudayaan;
c. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan Kebudayaan;
d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan Kebudayaan;
f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
i. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan Kebudayaan;
j. pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dan Kebudayaan;
k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan Kebudayaan;
l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi Umum dan Kepegawaian, subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan sumber daya manusia serta penyelenggaraan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan penyelenggaraan tugas pembantuan;
2) Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
3) Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, peningkatan sumber daya manusia dan tugas pembantuan;
4) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum, kepegawaian dan tugas pembantuan;
5) Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat

Kelompok JF Subtansi Sekretariat, melaksanakan fungsi :

1) pengelolaan urusan administrasi keuangan;
2) pelaksanaan pengawasan dan evaluasiadministrasi keuangan;
3) penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan
5) penyiapan bahan administrasi rencana Program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6) penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
b. Pembinaan pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana, dan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, serta subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional;
c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
d. Penyusunan rekomendasi izin pendirian, operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), penutupan dan penataan satuan Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD)dan Pendidikan Non Formal (PNF);
e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik danpembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
g. Pelaporan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakterpendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) membawahi 2 (dua) seksi, subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional, dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)

a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD, PNF

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD, PNF mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, penyusunan bahan rekomendasi izin pendirian, Operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan penutupan, penataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD, PNF mempunyai fungsi :

1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
3) penyusunan bahan rekomendasi izin pendirian, operasional, Surat Keterangan Terdafatar (SKT), penutupan dan penataan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
5) pelaporan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD, PNF

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD, PNF mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini danPendidikan Non Formal.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD, PNF mempunyai fungsi :

1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
2) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
3) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
4) Pelaporan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

c. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan kurikulum, penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal.

Dalam melaksanakan tugas Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;

3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
5) pelaporan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan Sekolah Dasar.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
b. pembinaan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana, dan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar, serta subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
d. penyusunan Rekomendasi Izin Pendirian, Operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Penutupan dan Penataan Sekolah Dasar;
e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
h. pelaporan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik danembangunan karakter sekolah dasar;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) membawahi 2 (dua) seksi, subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional

a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, penyusunan bahan rekomendasi penerbitan pendirian, operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan penutupan, penataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD mempunyai fungsi :

1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
3) penyusunan bahan rekomendasi izin pendirian, operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), penutupan dan penataan sekolah dasar;
4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
5) pelaporan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan minat, bakat, prestasi serta pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD mempunyai fungsi :

1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;

2) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
4) pelaporan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan kurikulum, penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian Sekolah Dasar serta pembinaan bahasa sastra penutur dalam daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;
3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
4) penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
6) pelaporankurikulum dan penilaian sekolah dasar;
7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana, dan peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama, serta Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
b. pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana, dan peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama serta Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
d. penyusunan rekomendasi pendirian, operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), penutupan dan penataan Sekolah Menengah Pertama;
e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
g. pelaporan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)membawahi 2 (dua) seksi, subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional

a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, penyusunan bahan rekomendasi penerbitan pendirian, operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan penutupan, penataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas), Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP mempunyai fungsi :

1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
3) penyusunan bahan rekomendasi pendirian, operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), penutupan dan penataan satuan Sekolah Menengah Pertama;
4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
5) pelaporan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan minat, bakat, prestasi serta pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP mempunyai fungsi :

1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
2) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
4) pelaporan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan kurikulum, penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama;
3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
5) pelaporan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak

Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;
b. penyusunan bahan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;
c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;
d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;
e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;
g. pelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan membawahi Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

6. Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengembangan budaya daerah, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pengembangan budaya daerah, kesenian tradisional dan sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan budaya daerah, kesenian tradisional dan sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
c. penyelenggaraan pengembangan budaya daerah, kesenian tradisional dan sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya daerah, kesenian tradisional dan sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional
   a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis JF sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian.
   c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
   d. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
   e. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Probolinggo didukung oleh sumber daya manusia dan aset yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pelayanan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Ketersediaan dan kompetensi aparatur, baik tenaga struktural maupun fungsional, menjadi penentu efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan.

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Secara umum, komposisi pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional pengawas dan penilik, pamong belajar, serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.

Berikut disajikan data jumlah sumber daya manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dan unit kerja:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma I/II/III | DIV/S1 | S2/S3 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kepala | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| **2** | Sekretariat | - | - | 7 | - | 7 | 3 | 17 |
| **3** | Bidang Pembinaan PAUD dan PNF | - | - | 2 | - | - | 4 | 6 |
| **4** | Bidang Pembinaan SD | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 8 |
| **5** | Bidang Pembinaan SMP | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 7 |
| **6** | Bidang Pembinaan Ketenagaan | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma I/II/III | DIV/S1 | S2/S3 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | Bidang Kebudayaan | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 9 |
| **8** | PNS JFT | | | | | | | |
| | a. Pengawas TK | - | - | - | - | 16 | 3 | 19 |
| | b. Pengawas SD | - | - | - | - | 15 | 27 | 42 |
| | c. Pengawas SMP | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
| | d. Penilik PAUD dan PNF | - | - | - | - | 12 | 3 | 15 |
| | e. Pamong | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| | f. Pendidik TK | - | - | 8 | 9 | 61 | 2 | 80 |
| | g. Pendidik SD | - | - | 55 | 88 | 1.898 | 138 | 2.179 |
| | h. Pendidik SMP | - | - | - | 6 | 659 | 115 | 780 |
| **9** | PNS Tenaga Kependidikan | | | | | | | - |
| | a. SD | 1 | 8 | 55 | 1 | 2 | - | 67 |
| | b. SMP | - | 3 | 81 | 1 | 35 | - | 120 |
| | **JUMLAH** | 1 | 11 | 214 | 106 | 2.723 | 313 | 3.368 |

*Sumber data : Dapodik Tahun 20224*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo sebanyak 3.368 orang, didominasi oleh pendidik jenjang SD dan SMP. Mayoritas pegawai memiliki kualifikasi Strata 1 (S1) sebanyak 2.723 orang, disusul Strata 2 dan 3 (S2/S3) sebanyak 313 orang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya manusia telah memenuhi standar kualifikasi pendidikan, meskipun masih terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan menengah yang perlu ditingkatkan kompetensinya. Ke depan, pengembangan SDM akan difokuskan pada peningkatan kompetensi profesional, digitalisasi pendidikan, dan penguatan kapasitas manajerial aparatur untuk mendukung mutu layanan pendidikan yang lebih baik.

b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo mencerminkan tingkat profesionalitas dan pengalaman kerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pengelompokan pegawai berdasarkan golongan menjadi salah satu indikator penting untuk melihat struktur kepegawaian serta jenjang karier yang telah dicapai. Berikut disajikan data pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo tahun 2024 berdasarkan golongan ruang:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Uraian | Golongan | | | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| **1** | Kepala | - | - | - | 1 | **1** |
| **2** | Sekretariat | - | 6 | 10 | 1 | **17** |
| **3** | Bidang Pembinaan PAUD dan PNF | - | 2 | 1 | 3 | **6** |
| **4** | Bidang Pembinaan SD | - | - | 5 | 3 | **8** |
| **5** | Bidang Pembinaan SMP | - | 3 | 4 | - | **7** |
| **6** | Bidang Pembinaan Ketenagaan | - | 3 | 4 | - | **7** |
| **7** | Bidang Kebudayaan | - | 2 | 5 | 2 | **9** |
| **8** | PNS JFT | | | | | **-** |
| | a. Pengawas TK | - | - | 3 | 16 | **19** |
| | b. Pengawas SD | - | - | 4 | 38 | **42** |
| | c. Pengawas SMP | - | - | - | 6 | **6** |
| | d. Penilik PAUD dan PNF | - | - | 7 | 8 | **15** |
| | e. Pamong | - | - | 1 | 4 | **5** |
| | f. Pendidik TK | - | 17 | 54 | 9 | **80** |
| | g. Pendidik SD | - | 146 | 1.267 | 766 | **2.179** |
| | h. Pendidik SMP | - | 2 | 399 | 379 | **780** |
| **9** | PNS Tenaga Kependidikan | | | | | **-** |
| | a. SD | 4 | 51 | 12 | - | **67** |
| | b. SMP | 5 | 72 | 43 | - | **120** |
| **JUMLAH** | | **9** | **304** | **1.819** | **1.236** | **3.368** |

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo tahun 2024 mencapai 3.368 orang. Sebagian besar berada pada Golongan III sebanyak 1.819 orang (sekitar 54%), disusul Golongan IV sebanyak 1.236 orang (sekitar 37%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah memiliki masa kerja dan kualifikasi yang memadai sesuai jenjang jabatan fungsional maupun struktural.

Sementara itu, pegawai pada Golongan II berjumlah 304 orang, dan Golongan I hanya 9 orang, yang umumnya berasal dari tenaga kependidikan di satuan pendidikan dasar. Komposisi ini menggambarkan bahwa struktur pegawai Dinas Dikdaya telah didominasi oleh aparatur dengan pengalaman kerja yang relatif tinggi dan berada pada jenjang karier menengah ke atas.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan stabilitas dan kematangan struktur kepegawaian, namun ke depan tetap diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan regenerasi aparatur, khususnya dalam menghadapi dinamika kebijakan pendidikan dan tantangan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.

2. Aset dan Sarana Prasarana

Aset merupakan salah satu sumber daya penting yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Pengelolaan aset daerah yang efektif dan akuntabel menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta efisiensi dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Aset yang dikelola oleh Dinas Dikdaya mencakup aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya, yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jaringan, serta aset tidak berwujud. Data aset berikut disajikan berdasarkan hasil pencatatan neraca belanja tahun 2025:

Tabel 2.3

Daftar Aset

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Akun Neraca Belanja | Tahun 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang | Saldo Akhir |
| **A.** | ASET LANCAR | | | | |
| **1** | Persediaan | 82.021.950,00 | 29.417.375.913,00 | 29.382.104.267,00 | 117.293.596,00 |
| | TOTAL PERSEDIAAN | 82.021.950,00 | 29.417.375.913,00 | 29.382.104.267,00 | 117.293.596,00 |
| **B.** | ASET TETAP | | | | |
| **1** | Tanah | 85.628.703.788,66 | | 220.067.733,33 | 85.408.636.055,33 |
| **2** | Peralatan & Mesin | 215.162.420.353,31 | 17.421.465.052,00 | 103.150.600,00 | 232.480.734.805,31 |
| **3** | Gedung & Bangunan | 555.084.156.846,91 | 15.432.281.879,00 | 1.283.612.324,89 | 569.232.826.401,03 |
| **4** | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 3.112.423.520,97 | 191.622.000,00 | | 3.304.045.520,97 |
| **5** | Aset Tetap Lainnya | 18.871.287.025,39 | 5.173.100.814,00 | 4.572.797.974,00 | 19.471.589.865,39 |
| **6** | Konstruksi Dalam Pekerjaan | 21.733.500,33 | | | 21.733.500,33 |
| **C.** | ASET LAINNYA | | | | |
| **1** | Aset Tidak Berwujud | 612.348.720,00 | 99.096.663,00 | | 711.445.383,00 |
| **2** | Aset Lainnya | 16.680.017.993,89 | | | 16.680.017.993,89 |
| **D.** | EXTRAKOMTABEL | | | | |
| | TOTAL ASET TETAP | 895.173.091.749,46 | 38.317.566.408,00 | 6.179.628.632,22 | 927.311.029.525,24 |

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Dikdaya meliputi berbagai jenis peralatan kantor, laboratorium, media pembelajaran, peralatan teknologi informasi, hingga kendaraan dinas yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan pendidikan.

Berikut daftar sarana dan prasarana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo tahun 2024:

Tabel 2.4

Daftar Sarana dan Prasarana Kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Nama barang | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| **1** | A.C. Sentral | 1 | Unit |

| No | Nama barang | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| **2** | A.C. Split | 16 | Unit |
| **3** | A.C. Window | 31 | Unit |
| **4** | Acces Point | 4 | Unit |
| **5** | Alat Badminton | 248 | Unit |
| 6 | Alat Kantor Lainnya Lain-Lain | 282 | Unit |
| 7 | Alat Laboratorium Lain-Lain | 28 | Unit |
| 8 | Alat Laboratorium Umum Lain-Lain | 260 | Unit |
| 9 | Alat Pemadam/Portable | 2 | Unit |
| 10 | Alat Penghancur Kertas | 9 | Unit |
| 11 | alat peraga kejuruan lainnya (dst) | 32760 | Unit |
| 12 | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain | 128 | Unit |
| 13 | Alat Rumahtangga Lainnya | 4 | Unit |
| 14 | Alat Tenis Meja | 87 | Unit |
| 15 | Alat Volley | 224 | Set |
| 16 | Amperemeter | 7 | Unit |
| 17 | Audio Tape Reel Recorder | 2 | Unit |
| 18 | Automatic Micro Plate Laser | 4 | Unit |
| 19 | Bidang Studi : IPA Lanjutan Lain-Lain | 12 | Unit |
| 20 | Brandkas | 3 | Unit |
| 21 | Burette | 6 | Paket |
| 22 | Camera Electronic | 4 | Unit |
| 23 | Camera film | 14 | Unit |
| 24 | Camera Video | 9 | Unit |
| 25 | CCTV - Camera Control Television System | 25 | Unit |
| 26 | Crusible Penyaring | 120 | Unit |
| 27 | Digital Audio Taperecorder | 2 | Unit |
| 28 | Dispenser | 2 | Unit |
| 29 | Facsimile | 2 | Unit |
| 30 | Filing Cabinet Besi | 30 | Unit |
| 31 | Gelas Kimia | 8 | Unit |
| 32 | Gelas Ukur | 53 | Unit |
| 33 | Gordyin/Kray | 11 | Unit |
| 34 | Hard Disk | 1 | Unit |
| 35 | Intercom Unit | 8 | Unit |
| 36 | Jam Mekanis | 18 | Unit |
| 37 | Kardex Besi | 1 | Unit |
| 38 | Kardex Kayu | 1 | Unit |
| 39 | Karpet | 773 | Unit |
| 40 | Kerangka Benda Ruang | 1 | Unit |
| 41 | Kipas Angin | 36 | Unit |

| No | Nama barang | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 42 | Klem (Laboratorium Kearsipan) | 2 | Unit |
| 43 | Kompor Distilasi | 8 | Unit |
| 44 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 56 | Unit |
| 45 | Kotak Kaca Obyek | 27 | Unit |
| 46 | Kursi Besi/Metal | 337 | Unit |
| 47 | Kursi Biasa | 3182 | Unit |
| 48 | Kursi Kayu | 43 | Unit |
| 49 | Kursi Kerja | 6 | Unit |
| 50 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 5 | Unit |
| 51 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 10 | Unit |
| 52 | Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain | 288 | Unit |
| 53 | Kursi Lipat | 320 | Unit |
| 54 | Kursi Rapat | 123 | Unit |
| 55 | Kursi Tamu | 24 | Unit |
| 56 | Lain-lain Alat Komunikasi Telephone | 48 | Unit |
| 57 | Lain-lain Alat Peraga  Bidang Studi  Matematika | 2 | Unit |
| 58 | Lain-lain Alat Peraga  Bidang Studi Keterampilan | 1 | Unit |
| 59 | Lain-Lain Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah | 3 | Unit |
| 60 | Lain-lain Meja Kerja Pejabat | 4 | Unit |
| 61 | Lain-Lain Meubelair | 147 | Unit |
| 62 | lain-lain Peralatan Komputer Mainframe | 2 | Meter Persegi |
| 63 | Lain-Lain Peralatan Olahraga Lainnya | 8946 | Unit |
| 64 | Lain-Lain Unit Alat Laboratorium Lainnya | 2 | Unit |
| 65 | Lap Top | 388 | Unit |
| 66 | Layar Film/Projector | 40 | Unit |
| 67 | Lemari Besi/Metal | 20 | Unit |
| 68 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 16 | Unit |
| 69 | Lemari Kaca | 6 | Unit |
| 70 | Lemari Kayu | 147 | Unit |
| 71 | Lemari Plastik | 2 | Unit |
| 72 | Lemari Sorok | 10 | Unit |
| 73 | Loudspeaker | 8 | Unit |
| 74 | Lumpang Besi | 8 | Unit |
| 75 | Matras | 114 | Unit |
| 76 | Measuring/Testing Device Lain-Lain | 4 | Unit |
| 77 | Meja 1/2 Biro | 3017 | Unit |
| 78 | Meja Kerja Kayu | 222 | Unit |
| 79 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 5 | Unit |

| No | Nama barang | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 80 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 11 | Unit |
| 81 | Meja Komputer | 105 | Unit |
| 82 | Meja Rapat Pejabat Lain-Lain | 1 | Unit |
| 83 | Meja Sekolah | 62 | Unit |
| 84 | Meja Tamu Biasa | 16 | Unit |
| 85 | Mesin Absensi | 14 | Unit |
| 86 | Mesin Hitung Manual | 4 | Unit |
| 87 | Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) | 26 | Unit |
| 88 | Mesin Stensil Manual Folio | 3 | Unit |
| 89 | Microphone | 4 | Unit |
| 90 | Microphone/Wireless MIC | 2 | Unit |
| 91 | Mikroskop | 125 | Unit |
| 92 | Mimbar/Podium | 2 | Unit |
| 93 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 1 | Unit |
| 94 | Model Ginjal | 2 | Unit |
| 95 | Model mata | 1 | Unit |
| 96 | Model Pencernaan Makanan | 1 | Unit |
| 97 | Model Tarso Wanita | 1 | Unit |
| 98 | Model Torso Mini | 1 | Unit |
| 99 | Modulation Monitor Speaker Kabaret | 6 | Unit |
| 100 | Note Book | 8 | Unit |
| 101 | Overhead Projector | 2 | Unit |
| 102 | P.C Unit | 737 | Unit |
| 103 | Papan Nama Instansi | 1 | Unit |
| 104 | Papan Peraga | 93 | Unit |
| 105 | Papan Tulis | 4 | Unit |
| 106 | Papan Tulis Berkotak | 28 | Unit |
| 107 | Papan Visual/Papan Nama | 12 | Unit |
| 108 | Penyemprot Mesin (Power Sprayer) | 1 | Unit |
| 109 | Peralatan Jaringan Lain-Lain | 2 | Unit |
| 110 | Peralatan Komputer Lain-lainnya | 5 | Unit |
| 111 | PERALATAN PERMAINAN LAIN – LAIN | 11405 | Unit |
| 112 | Peralatan Personal Komputer Lain-Lain | 12 | Unit |
| 113 | Peralatan Studio Audio Lainnya | 15 | Unit |
| 114 | Peti Uang/Cash Box/Coin Box | 3 | Unit |
| 115 | Pipa Kaca Lurus | 29 | Unit |
| 116 | Pipet Tetes | 78 | Unit |
| 117 | Pompa Air | 4 | Unit |
| 118 | Preccision Thermocouple Calibration Standard | 8 | Unit |
| 119 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 118 | Unit |
| 120 | Rak Besi | 16 | Unit |

| No | Nama barang | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 121 | Rak Kayu | 610 | Unit |
| 122 | Router | 4 | Unit |
| 123 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 6 | Unit |
| 124 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 2 | Unit |
| 125 | Sepeda | 22 | Unit |
| 126 | Sepeda Motor | 52 | Unit |
| 127 | Sofa | 5 | Unit |
| 128 | Sound System | 12 | Unit |
| 129 | Sport Utility Vehicle (SUV) | 1 | Unit |
| 130 | Station Wagon | 8 | Unit |
| 131 | Statip | 8 | Unit |
| 132 | Stop Watch | 5 | Unit |
| 133 | Switcher Antena Lain-Lain | 2 | Unit |
| 134 | Tabung Reaksi | 8 | Unit |
| 135 | Tangga Hidrolik | 1 | Unit |
| 136 | Telephone Hybrid | 16 | Unit |
| 137 | Televisi | 26 | Unit |
| 138 | Thermohidrometer | 5 | Unit |
| 139 | Thermometer Badan | 6 | Unit |
| 140 | Thermometer Kamar | 7 | Unit |
| 141 | Tiang Bendera | 2 | Unit |
| 142 | Timbangan Barang | 3 | Unit |
| 143 | Variable Resistor | 5 | Unit |
| 144 | Volt Ampere Tester | 3 | Unit |
| 145 | White Board | 32 | Unit |
| 146 | Wireless Access Point | 3 | Unit |
| 147 | Wireless Amplifier | 2 | Unit |
| | Jumlah aset tetap | 1877 | |

3. Satuan Pendidikan

Jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Probolinggo mencakup berbagai jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari Raudhatul Athfal (RA), Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, terdapat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, terdapat lembaga pendidikan berbasis keagamaan di bawah Kementerian Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah

Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), yang memiliki standar setara dengan sekolah umum.

Keberadaan satuan pendidikan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata di Kabupaten Probolinggo. Data jumlah dan distribusi sekolah menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan untuk memastikan setiap anak memperoleh pendidikan berkualitas, baik melalui sekolah umum maupun madrasah, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Kabupaten Probolinggo.

a. Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA)

TK dan RA merupakan bagian dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berperan dalam memberikan stimulasi awal bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. TK berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sementara RA dikelola oleh Kementerian Agama dengan kurikulum berbasis nilai-nilai keislaman. Data satuan pendidikan pada jenjang ini menggambarkan tingkat kesiapan pendidikan usia dini di Kabupaten Probolinggo.

Kabupaten Probolinggo memiliki Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) yang tersebar di berbagai kecamatan untuk mendukung pendidikan anak usia dini. TK merupakan satuan pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan, sedangkan RA berada di bawah Kementerian Agama dengan kurikulum berbasis keislaman.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah TK dan RA di masing-masing kecamatan di Kabupaten Probolinggo:

Grafik 2.1
Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)
dan Raudhatul Athfal (RA)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024

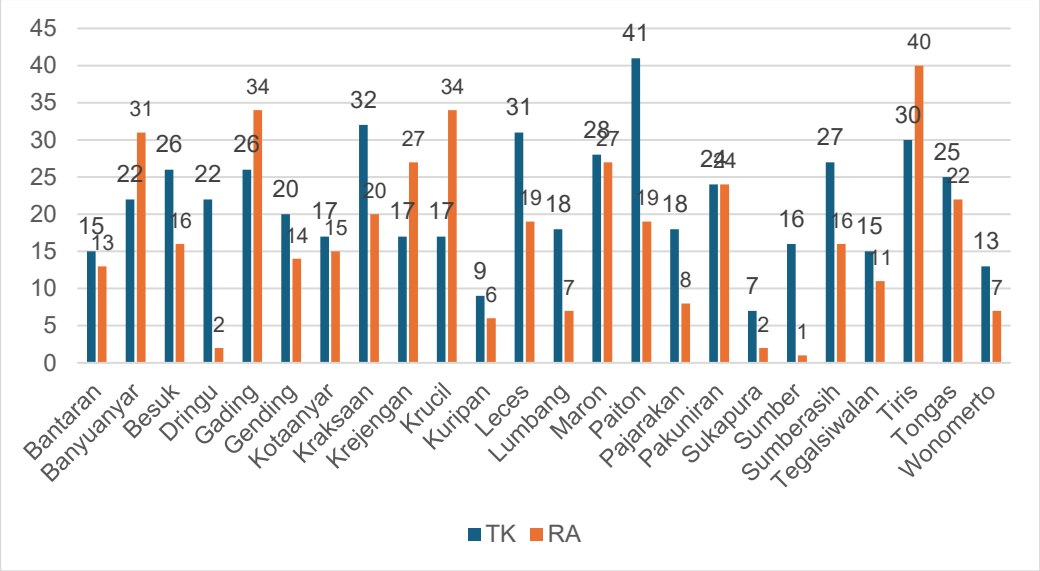


*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Berdasarkan grafik di atas, kecamatan dengan jumlah TK tertinggi adalah Paiton (41 TK), Kraksaan (32 TK), dan Leces (31 TK). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah RA terbanyak adalah Tiris (40 RA), Gading (34 RA), dan Krucil (34 RA).

Perbedaan jumlah TK dan RA di setiap kecamatan mencerminkan variasi akses layanan pendidikan anak usia dini. Untuk itu, diperlukan upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan agar seluruh anak dapat memperoleh kesempatan belajar yang optimal sejak dini.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai sebaran satuan pendidikan anak usia dini, berikut adalah tabel yang menampilkan jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) baik negeri maupun swasta di setiap kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Data ini mencakup jumlah TK dan RA berdasarkan kategori serta total keseluruhan satuan pendidikan di masing-masing wilayah :

Tabel 2.5
Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024

| No | Kecamatan | TK | | | RA | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml |
| 1 | Bantaran | | 15 | 15 | | 13 | 13 | | 28 | **28** |
| 2 | Banyuanyar | | 22 | 22 | | 31 | 31 | | 53 | **53** |
| 3 | Besuk | | 26 | 26 | | 16 | 16 | | 42 | **42** |
| 4 | Dringu | 1 | 21 | 22 | | 2 | 2 | 1 | 23 | **24** |
| 5 | Gading | | 26 | 26 | | 34 | 34 | | 60 | **60** |
| 6 | Gending | | 20 | 20 | | 14 | 14 | | 34 | **34** |
| 7 | Kotaanyar | | 17 | 17 | | 15 | 15 | | 32 | **32** |
| 8 | Kraksaan | 2 | 30 | 32 | | 20 | 20 | 2 | 50 | **52** |
| 9 | Krejengan | | 17 | 17 | | 27 | 27 | | 44 | **44** |
| 10 | Krucil | | 17 | 17 | | 34 | 34 | | 51 | **51** |
| 11 | Kuripan | | 9 | 9 | | 6 | 6 | | 15 | **15** |
| 12 | Leces | | 31 | 31 | | 19 | 19 | | 50 | **50** |
| 13 | Lumbang | | 18 | 18 | | 7 | 7 | | 25 | **25** |
| 14 | Maron | | 28 | 28 | | 27 | 27 | | 55 | **55** |
| 15 | Paiton | | 41 | 41 | | 19 | 19 | | 60 | **60** |
| 16 | Pajarakan | | 18 | 18 | | 8 | 8 | | 26 | **26** |
| 17 | Pakuniran | | 24 | 24 | | 24 | 24 | | 48 | **48** |
| 18 | Sukapura | 1 | 6 | 7 | | 2 | 2 | 1 | 8 | **9** |
| 19 | Sumber | | 16 | 16 | | 1 | 1 | | 17 | **17** |
| 20 | Sumberasih | 1 | 26 | 27 | | 16 | 16 | 1 | 42 | **43** |
| 21 | Tegalsiwalan | | 15 | 15 | | 11 | 11 | | 26 | **26** |
| 22 | Tiris | | 30 | 30 | | 40 | 40 | | 70 | **70** |
| 23 | Tongas | | 25 | 25 | | 22 | 22 | | 47 | **47** |
| 24 | Wonomerto | | 13 | 13 | | 7 | 7 | | 20 | **20** |
| **Jumlah** | | **5** | **511** | **516** | **0** | **415** | **415** | **5** | **926** | **931** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Tiris memiliki jumlah satuan pendidikan anak usia dini tertinggi dengan 70 lembaga, disusul oleh Kecamatan Gading dan Paiton yang masing-masing memiliki 60 lembaga. Sementara itu, Kecamatan dengan jumlah satuan pendidikan terendah adalah Sukapura (9 lembaga) dan Sumber (17 lembaga).

b. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan jenjang pendidikan dasar yang berperan penting dalam membentuk

fondasi akademik serta karakter peserta didik. Kabupaten Probolinggo memiliki sebaran satuan pendidikan SD dan MI di setiap kecamatan guna memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Berikut adalah grafik yang menampilkan jumlah satuan pendidikan SD dan MI di masing-masing kecamatan:

Grafik 2.2

Jumlah Satuan Pendidikan SD dan MI

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

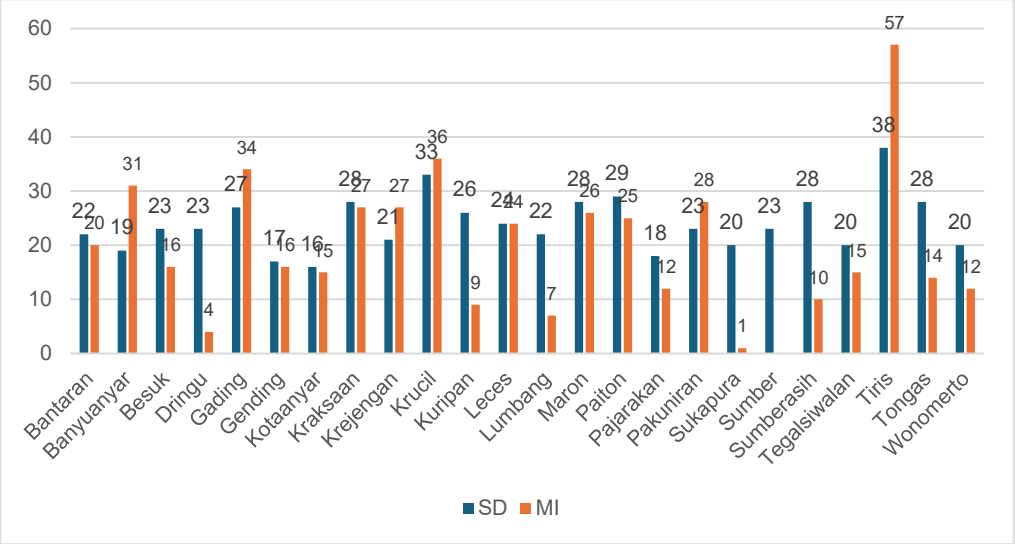


*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Sementara itu, tabel berikut menyajikan data lebih rinci mengenai jumlah SD dan MI, baik negeri maupun swasta, serta total keseluruhan satuan pendidikan di setiap wilayah:

Tabel 2.6

Jumlah Satuan Pendidikan SD dan MI

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Kecamatan | SD | | | MI | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml |
| **1** | Bantaran | 22 | 2 | 24 | | 18 | 18 | 22 | 20 | **42** |
| **2** | Banyuanyar | 19 | 2 | 21 | | 29 | 29 | 19 | 31 | **50** |
| **3** | Besuk | 23 | | 23 | | 16 | 16 | 23 | 16 | **39** |
| **4** | Dringu | 23 | | 23 | | 4 | 4 | 23 | 4 | **27** |
| **5** | Gading | 27 | 1 | 28 | | 33 | 33 | 27 | 34 | **61** |
| **6** | Gending | 17 | 4 | 21 | | 12 | 12 | 17 | 16 | **33** |
| **7** | Kotaanyar | 16 | 1 | 17 | | 14 | 14 | 16 | 15 | **31** |
| **8** | Kraksaan | 28 | 10 | 38 | | 17 | 17 | 28 | 27 | **55** |
| **9** | Krejengan | 21 | 1 | 22 | | 26 | 26 | 21 | 27 | **48** |
| **10** | Krucil | 33 | 1 | 34 | | 35 | 35 | 33 | 36 | **69** |
| **11** | Kuripan | 26 | | 26 | | 9 | 9 | 26 | 9 | **35** |
| **12** | Leces | 24 | 7 | 31 | | 17 | 17 | 24 | 24 | **48** |
| **13** | Lumbang | 22 | 1 | 23 | | 6 | 6 | 22 | 7 | **29** |
| **14** | Maron | 27 | 1 | 28 | 1 | 25 | 26 | 28 | 26 | **54** |
| **15** | Paiton | 28 | 2 | 30 | 1 | 23 | 24 | 29 | 25 | **54** |
| **16** | Pajarakan | 18 | 2 | 20 | | 10 | 10 | 18 | 12 | **30** |
| **17** | Pakuniran | 23 | 3 | 26 | | 25 | 25 | 23 | 28 | **51** |
| **18** | Sukapura | 20 | 1 | 21 | | | | 20 | 1 | **21** |
| **19** | Sumber | 23 | | 23 | | | | 23 | | **23** |
| **20** | Sumberasih | 28 | 2 | 30 | | 8 | 8 | 28 | 10 | **38** |
| **21** | Tegalsiwalan | 20 | 2 | 22 | | 13 | 13 | 20 | 15 | **35** |
| **22** | Tiris | 38 | 6 | 44 | | 51 | 51 | 38 | 57 | **95** |
| **23** | Tongas | 28 | 2 | 30 | | 12 | 12 | 28 | 14 | **42** |
| **24** | Wonomerto | 20 | 1 | 21 | | 11 | 11 | 20 | 12 | **32** |
| | **Jumlah** | **574** | **52** | **626** | **2** | **414** | **416** | **576** | **466** | **1.042** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Dari data yang tersaji, terlihat bahwa Kecamatan Tiris memiliki jumlah satuan pendidikan terbanyak dengan total 95 sekolah, terdiri dari 44 SD dan 51 MI. Sementara itu, Kecamatan Sumber memiliki jumlah paling sedikit dengan total 23 sekolah yang seluruhnya merupakan SD.

Keberagaman jumlah satuan pendidikan ini mencerminkan kebutuhan dan kepadatan penduduk di masing-masing wilayah. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan di seluruh kecamatan agar setiap anak dapat menikmati pendidikan dasar yang berkualitas

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Pendidikan tingkat menengah pertama di Kabupaten Probolinggo terdiri dari dua jenis sekolah, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). SMP umumnya berfokus pada kurikulum nasional yang mencakup berbagai mata pelajaran umum, sedangkan MTs memiliki kurikulum yang serupa dengan tambahan penguatan pada pendidikan agama Islam. Keberadaan kedua jenis sekolah ini memberikan pilihan bagi masyarakat dalam menentukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut. Dengan sebaran yang bervariasi di setiap kecamatan, baik SMP maupun MTs berperan penting dalam membangun fondasi pendidikan bagi generasi muda di Kabupaten Probolinggo.

Grafik 2.3
Jumlah SMP dan MTs
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024

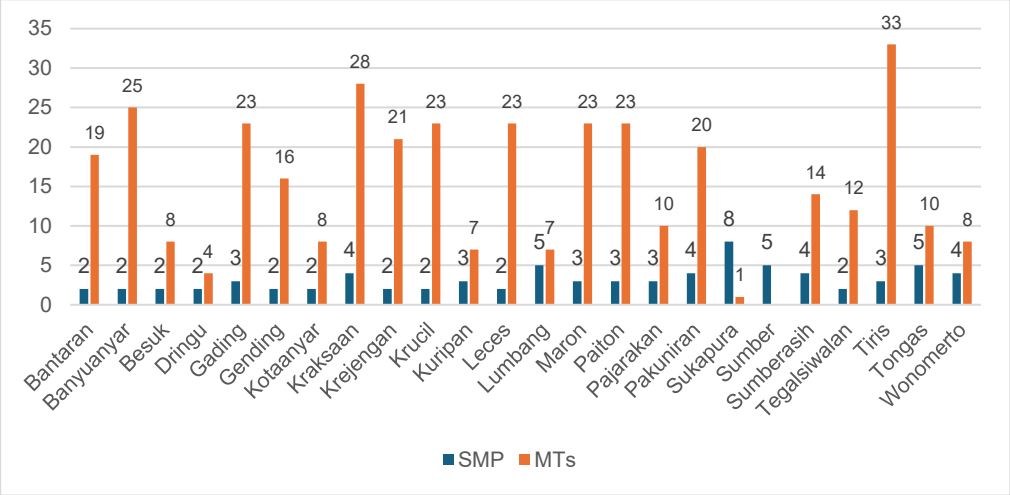


*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Data yang disajikan dalam tabel dan grafik menunjukkan distribusi jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di berbagai kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Jumlah SMP di setiap kecamatan relatif lebih sedikit dibandingkan MTs. Kecamatan dengan jumlah SMP terbanyak adalah Sukapura dengan 8 sekolah, diikuti oleh Sumber (5 sekolah), Lumbang (5 sekolah), Tongas (5 sekolah), dan Wonomerto (4 sekolah). Sebagian besar kecamatan lainnya memiliki jumlah SMP yang berkisar antara 2 hingga 3 sekolah.

Sebaliknya, sebaran MTs jauh lebih banyak dibandingkan SMP. Kecamatan dengan jumlah MTs tertinggi adalah Tiris dengan 33 sekolah, diikuti oleh Kraksaan dengan 28 sekolah, serta Banyuanyar dengan 25 sekolah. Beberapa kecamatan lain juga memiliki lebih dari 20 MTs, seperti Gading, Krucil, Leces, Maron, dan Paiton. Hal ini menunjukkan dominasi MTs dalam sistem pendidikan menengah pertama di wilayah ini, kemungkinan besar karena faktor budaya dan preferensi masyarakat terhadap pendidikan berbasis agama.

Secara keseluruhan, terdapat 77 SMP dan 366 MTs di Kabupaten Probolinggo, dengan total keseluruhan mencapai 443 sekolah. Distribusi ini menunjukkan bahwa di beberapa kecamatan, jumlah MTs sangat mendominasi dibandingkan dengan SMP. Misalnya, di Kecamatan Tiris terdapat 33 MTs dengan hanya 3 SMP, dan di Kecamatan Kraksaan terdapat 28 MTs dengan 4 SMP. Kondisi ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pemerataan akses pendidikan bagi siswa SMP dan MTs di masa mendatang

Berikut menyajikan data lebih rinci mengenai jumlah SMP dan MTs, baik negeri maupun swasta, serta total keseluruhan satuan pendidikan di setiap wilayah:

Tabel 2.7

Jumlah SMP dan MTs

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Kecamatan | SMP | | | MTs | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml |
| **1** | Bantaran | 2 | 6 | 8 | | 13 | 13 | 2 | 19 | **21** |
| **2** | Banyuanyar | 2 | 14 | 16 | | 11 | 11 | 2 | 25 | **27** |
| **3** | Besuk | 2 | 4 | 6 | | 4 | 4 | 2 | 8 | **10** |
| **4** | Dringu | 2 | | 2 | | 4 | 4 | 2 | 4 | **6** |
| **5** | Gading | 3 | 8 | 11 | | 15 | 15 | 3 | 23 | **26** |
| **6** | Gending | 2 | 4 | 6 | | 12 | 12 | 2 | 16 | **18** |
| **7** | Kotaanyar | 2 | 2 | 4 | | 6 | 6 | 2 | 8 | **10** |
| **8** | Kraksaan | 4 | 14 | 18 | | 14 | 14 | 4 | 28 | **32** |
| **9** | Krejengan | 2 | 9 | 11 | | 12 | 12 | 2 | 21 | **23** |
| **10** | Krucil | 2 | 6 | 8 | | 17 | 17 | 2 | 23 | **25** |
| **11** | Kuripan | 3 | 3 | 6 | | 4 | 4 | 3 | 7 | **10** |

| No | Kecamatan | SMP | | | MTs | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml |
| **12** | Leces | 2 | 9 | 11 | | 14 | 14 | 2 | 23 | **25** |
| **13** | Lumbang | 5 | 3 | 8 | | 4 | 4 | 5 | 7 | **12** |
| **14** | Maron | 3 | 10 | 13 | | 13 | 13 | 3 | 23 | **26** |
| **15** | Paiton | 2 | 6 | 8 | 1 | 17 | 18 | 3 | 23 | **26** |
| **16** | Pajarakan | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | **13** |
| **17** | Pakuniran | 4 | 8 | 12 | | 12 | 12 | 4 | 20 | **24** |
| **18** | Sukapura | 8 | 1 | 9 | | | | 8 | 1 | **9** |
| **19** | Sumber | 5 | | 5 | | | | 5 | | **5** |
| **20** | Sumberasih | 4 | 6 | 10 | | 8 | 8 | 4 | 14 | **18** |
| **21** | Tegalsiwalan | 2 | 3 | 5 | | 9 | 9 | 2 | 12 | **14** |
| **22** | Tiris | 3 | 16 | 19 | | 17 | 17 | 3 | 33 | **36** |
| **23** | Tongas | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | **15** |
| **24** | Wonomerto | 4 | 2 | 6 | | 6 | 6 | 4 | 8 | **12** |
| **Jumlah** | | **74** | **144** | **218** | **3** | **222** | **225** | **77** | **366** | **443** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

d. Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di Kabupaten Probolinggo memiliki peran penting dalam membangun fondasi pembelajaran bagi anak-anak serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terus belajar di luar sistem pendidikan formal. Berbagai satuan pendidikan seperti Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tersebar di berbagai kecamatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat dari berbagai usia. Keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif, guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Probolinggo

Berikut menyajikan data lebih rinci mengenai jumlah Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di setiap wilayah :

Tabel 2.8

Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Dan Pendidikan Nonformal

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Kecamatan | KB | TPA | SPS | PKBM | SKB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Bantaran | 7 | | 6 | 2 | |
| **2** | Banyuanyar | 42 | | 4 | 1 | |
| **3** | Besuk | 26 | | 5 | 2 | |
| **4** | Dringu | 9 | 1 | 12 | 1 | |
| **5** | Gading | 45 | | 3 | 2 | |
| **6** | Gending | 15 | | 3 | 2 | |
| **7** | Kotaanyar | 25 | | 8 | 1 | |
| **8** | Kraksaan | 28 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| **9** | Krejengan | 9 | | 14 | | |
| **10** | Krucil | 25 | | 9 | 1 | |
| **11** | Kuripan | 8 | | | 1 | |
| **12** | Leces | 17 | | 4 | 1 | |
| **13** | Lumbang | 12 | | 1 | | |
| **14** | Maron | 17 | | 32 | 2 | |
| **15** | Paiton | 27 | 1 | 7 | 2 | |
| **16** | Pajarakan | 15 | | 8 | | |
| **17** | Pakuniran | 33 | | 4 | 1 | |
| **18** | Sukapura | 12 | | 3 | 1 | |
| **19** | Sumber | | | | | |
| **20** | Sumberasih | 16 | | 1 | 1 | |
| **21** | Tegalsiwalan | 14 | | 1 | | |
| **22** | Tiris | 27 | | 11 | 2 | |
| **23** | Tongas | 10 | 1 | 8 | 1 | |
| **24** | Wonomerto | 10 | | 3 | 1 | |
| **Jumlah** | | **449** | **5** | **152** | **26** | **1** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

4. Peserta Didik

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Probolinggo menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi di hampir seluruh kecamatan. Berdasarkan data jumlah peserta didik pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA), terlihat bahwa ribuan anak telah mengakses pendidikan prasekolah sebagai bagian dari persiapan mereka sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

Secara keseluruhan, jumlah peserta didik TK di Kabupaten Probolinggo mencapai 19.894 anak, sedangkan peserta didik RA berjumlah 16.213 anak, sehingga total peserta didik PAUD formal mencapai 36.107 anak. Kecamatan Kraksaan memiliki jumlah peserta didik terbanyak dengan

2.808 anak, disusul oleh Kecamatan Paiton dengan 2.551 anak dan Kecamatan Maron dengan 2.304 anak.

Berikut adalah tabel peserta didik untuk TK dan RA baik Negeri maupun Swasta :

Tabel 2.9

Jumlah Peserta Didik TK dan RA

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Kecamatan | TK | | | RA | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml |
| **1** | Bantaran | | 565 | 565 | | 359 | 359 | - | 924 | **924** |
| **2** | Banyuanyar | | 809 | 809 | | 1.146 | 1.146 | - | 1.955 | **1.955** |
| **3** | Besuk | | 920 | 920 | | 741 | 741 | - | 1.661 | **1.661** |
| **4** | Dringu | 108 | 1.101 | 1.209 | | 75 | 75 | 108 | 1.176 | **1.284** |
| **5** | Gading | | 785 | 785 | | 1.091 | 1.091 | - | 1.876 | **1.876** |
| **6** | Gending | | 883 | 883 | | 510 | 510 | - | 1.393 | **1.393** |
| **7** | Kotaanyar | | 457 | 457 | | 472 | 472 | - | 929 | **929** |
| **8** | Kraksaan | 94 | 1.737 | 1.831 | | 977 | 977 | 94 | 2.714 | **2.808** |
| **9** | Krejengan | | 515 | 515 | | 1.127 | 1.127 | - | 1.642 | **1.642** |
| **10** | Krucil | | 549 | 549 | | 1.383 | 1.383 | - | 1.932 | **1.932** |
| **11** | Kuripan | | 326 | 326 | | 198 | 198 | - | 524 | **524** |
| **12** | Leces | | 1.326 | 1.326 | | 535 | 535 | - | 1.861 | **1.861** |
| **13** | Lumbang | | 566 | 566 | | 194 | 194 | - | 760 | **760** |
| **14** | Maron | | 1.238 | 1.238 | | 1.066 | 1.066 | - | 2.304 | **2.304** |
| **15** | Paiton | | 1.661 | 1.661 | | 890 | 890 | - | 2.551 | **2.551** |
| **16** | Pajarakan | | 803 | 803 | | 353 | 353 | - | 1.156 | **1.156** |
| **17** | Pakuniran | | 629 | 629 | | 839 | 839 | - | 1.468 | **1.468** |
| **18** | Sukapura | 53 | 197 | 250 | | 55 | 55 | 53 | 252 | **305** |
| **19** | Sumber | | 354 | 354 | | 19 | 19 | - | 373 | **373** |
| **20** | Sumberasih | 76 | 1.089 | 1.165 | | 576 | 576 | 76 | 1.665 | **1.741** |
| **21** | Tegalsiwalan | | 475 | 475 | | 458 | 458 | - | 933 | **933** |
| **22** | Tiris | | 884 | 884 | | 1.201 | 1.201 | - | 2.085 | **2.085** |
| **23** | Tongas | | 1.056 | 1.056 | | 822 | 822 | - | 1.878 | **1.878** |
| **24** | Wonomerto | | 638 | 638 | | 1.126 | 1.126 | - | 1.764 | **1.764** |
| **Jumlah** | | **331** | **19.563** | **19.894** | **-** | **16.213** | **16.213** | **31** | **35.776** | **36.107** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Untuk tingkat Pendidikan dasar, jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 106.854 siswa. Dari jumlah tersebut,

siswa SD mencapai 69.996 siswa, sedangkan siswa MI sebanyak 36.858 siswa.

Kecamatan dengan jumlah siswa terbanyak adalah Kraksaan dengan total 7.970 siswa, terdiri dari 5.672 siswa SD dan 2.298 siswa MI. Disusul oleh Kecamatan Maron dengan 6.652 siswa dan Paiton dengan 6.698 siswa. Sementara itu, Kecamatan dengan jumlah siswa paling sedikit adalah Sukapura dengan 1.477 siswa dan Sumber dengan 2.200 siswa.

Jika dilihat berdasarkan distribusi, siswa SD masih mendominasi jumlah keseluruhan dengan 64.122 siswa, sementara siswa MI tercatat 42.732 siswa. Kecamatan dengan jumlah siswa SD tertinggi adalah Tongas dengan 4.826 siswa, sedangkan kecamatan dengan jumlah siswa MI terbanyak adalah Tiris dengan 3.571 siswa.

Berikut adalah tabel peserta didik untuk SD dan MI baik Negeri maupun Swasta :

Tabel 2.10
Jumlah Peserta Didik SD dan MI
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024

| No | Kecamatan | SD | | | MI | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml |
| **1** | Bantaran | 2.410 | 213 | 2.623 | | 1.344 | 1.344 | 2.410 | 1.557 | **3.967** |
| **2** | Banyuanyar | 1.953 | 217 | 2.170 | | 2.791 | 2.791 | 1.953 | 3.008 | **4.961** |
| **3** | Besuk | 2.364 | | 2.364 | | 18 | 18 | 2.364 | 18 | **2.382** |
| **4** | Dringu | 3.485 | | 3.485 | | 226 | 226 | 3.485 | 226 | **3.711** |
| **5** | Gading | 2.194 | 22 | 2.216 | | 2.957 | 2.957 | 2.194 | 2.979 | **5.173** |
| **6** | Gending | 2.459 | 480 | 2.939 | | 1.166 | 1.166 | 2.459 | 1.646 | **4.105** |
| **7** | Kotaanyar | 1.733 | 83 | 1.816 | | 959 | 959 | 1.733 | 1.042 | **2.775** |
| **8** | Kraksaan | 3.538 | 2.134 | 5.672 | | 2.298 | 2.298 | 3.538 | 4.432 | **7.970** |
| **9** | Krejengan | 1.720 | 68 | 1.788 | | 2.153 | 2.153 | 1.720 | 2.221 | **3.941** |
| **10** | Krucil | 3.031 | 111 | 3.142 | | 2.962 | 2.962 | 3.031 | 3.073 | **6.104** |
| **11** | Kuripan | 2.119 | | 2.119 | | 650 | 650 | 2.119 | 650 | **2.769** |
| **12** | Leces | 3.216 | 902 | 4.118 | | 1.205 | 1.205 | 3.216 | 2.107 | **5.323** |
| **13** | Lumbang | 2.295 | 14 | 2.309 | | 461 | 461 | 2.295 | 475 | **2.770** |
| **14** | Maron | 3.443 | 31 | 3.474 | 441 | 2.737 | 3.178 | 3.884 | 2.768 | **6.652** |
| **15** | Paiton | 2.913 | 872 | 3.785 | 321 | 2.592 | 2.913 | 3.234 | 3.464 | **6.698** |
| **16** | Pajarakan | 1.798 | 431 | 2.229 | | 1.066 | 1.066 | 1.798 | 1.497 | **3.295** |
| **17** | Pakuniran | 1.920 | 132 | 2.052 | | 1.881 | 1.881 | 1.920 | 2.013 | **3.933** |
| **18** | Sukapura | 1.438 | 39 | 1.477 | | | - | 1.438 | 39 | **1.477** |

| No | Kecamatan | SD | | | MI | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml |
| **19** | Sumber | 2.200 | | 2.200 | | | - | 2.200 | - | **2.200** |
| **20** | Sumberasih | 4.499 | 228 | 4.727 | | 728 | 728 | 4.499 | 956 | **5.455** |
| **21** | Tegalsiwalan | 2.125 | 77 | 2.202 | | 992 | 992 | 2.125 | 1.069 | **3.194** |
| **22** | Tiris | 3.546 | 395 | 3.941 | | 3.571 | 3.571 | 3.546 | 3.966 | **7.512** |
| **23** | Tongas | 4.663 | 163 | 4.826 | | 997 | 997 | 4.663 | 1.160 | **5.823** |
| **24** | Wonomerto | 2.298 | 24 | 2.322 | | 2.342 | 2.342 | 2.298 | 2.366 | **4.664** |
| **Jumlah** | | **63.360** | **6.636** | **69.996** | **762** | **36.096** | **36.858** | **64.122** | **42.732** | **106.854** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Untuk tingkat Pendidikan menengah pertama, jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 52.320 siswa, dengan rincian 30.960 siswa SMP dan 21.360 siswa MTs. Kecamatan dengan jumlah siswa terbanyak adalah Paiton dengan 5.930 siswa, diikuti oleh Kraksaan dengan 5.567 siswa, serta Maron dengan 4.293 siswa. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah siswa paling sedikit adalah Sumber dengan 668 siswa dan Sukapura dengan 779 siswa.

Berikut adalah tabel peserta didik untuk SMP dan MTs baik Negeri maupun Swasta :

Tabel 2.11

Jumlah Peserta Didik SMP dan MTs

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Kecamatan | SMP | | | MTs | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml |
| **1** | Bantaran | 354 | 396 | 750 | | 837 | 837 | 354 | 1.233 | **1.587** |
| **2** | Banyuanyar | 585 | 696 | 1.281 | | 992 | 992 | 585 | 1.688 | **2.273** |
| **3** | Besuk | 775 | 374 | 1.149 | | 711 | 711 | 775 | 1.085 | **1.860** |
| **4** | Dringu | 1.105 | | 1.105 | | 214 | 214 | 1.105 | 214 | **1.319** |
| **5** | Gading | 606 | 418 | 1.024 | | 1.105 | 1.105 | 606 | 1.523 | **2.129** |
| **6** | Gending | 810 | 709 | 1.519 | | 626 | 626 | 810 | 1.335 | **2.145** |
| **7** | Kotaanyar | 381 | 101 | 482 | | 342 | 342 | 381 | 443 | **824** |
| **8** | Kraksaan | 1.597 | 1.767 | 3.364 | | 2.203 | 2.203 | 1.597 | 3.970 | **5.567** |
| **9** | Krejengan | 402 | 687 | 1.089 | | 969 | 969 | 402 | 1.656 | **2.058** |
| **10** | Krucil | 401 | 365 | 766 | | 955 | 955 | 401 | 1.320 | **1.721** |
| **11** | Kuripan | 285 | 243 | 528 | | 231 | 231 | 285 | 474 | **759** |

| No | Kecamatan | SMP | | | MTs | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml |
| **12** | Leces | 879 | 701 | 1.580 | | 1.161 | 1.161 | 879 | 1.862 | **2.741** |
| **13** | Lumbang | 575 | 91 | 666 | | 306 | 306 | 575 | 397 | **972** |
| **14** | Maron | 1.177 | 1.712 | 2.889 | | 1.404 | 1.404 | 1.177 | 3.116 | **4.293** |
| **15** | Paiton | 687 | 2.013 | 2.700 | 635 | 2.595 | 3.230 | 1.322 | 4.608 | **5.930** |
| **16** | Pajarakan | 779 | 828 | 1.607 | 516 | 1.508 | 2.024 | 1.295 | 2.336 | **3.631** |
| **17** | Pakuniran | 438 | 419 | 857 | | 333 | 333 | 438 | 752 | **1.190** |
| **18** | Sukapura | 741 | 38 | 779 | | | - | 741 | 38 | **779** |
| **19** | Sumber | 668 | | 668 | | | - | 668 | - | **668** |
| **20** | Sumberasih | 1.336 | 578 | 1.914 | | 558 | 558 | 1.336 | 1.136 | **2.472** |
| **21** | Tegalsiwalan | 605 | 97 | 702 | | 874 | 874 | 605 | 971 | **1.576** |
| **22** | Tiris | 589 | 812 | 1.401 | | 1.179 | 1.179 | 589 | 1.991 | **2.580** |
| **23** | Tongas | 879 | 464 | 1.343 | 169 | 163 | 332 | 1.048 | 627 | **1.675** |
| **24** | Wonomerto | 722 | 75 | 797 | | 774 | 774 | 722 | 849 | **1.571** |
| **Jumlah** | | **17.376** | **13.584** | **30.960** | **1.320** | **20.040** | **21.360** | **18.696** | **33.624** | **52.320** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Pada Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal Kabupaten Probolinggo mencatat jumlah peserta didik pada berbagai lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang tersebar di seluruh kecamatan. Secara keseluruhan, jumlah peserta didik Kelompok Bermain (KB) mencapai 11.097 anak, sementara peserta didik di Satuan PAUD Sejenis (SPS) berjumlah 4.157 anak. Selain itu, terdapat 124 anak yang terdaftar di Taman Penitipan Anak (TPA).

Pada sektor pendidikan nonformal, jumlah peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mencapai 1.025 orang, dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Kraksaan sebanyak 1.025 peserta didik. Selain itu, peserta didik yang mengikuti pembelajaran di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tercatat sebanyak 6.214 orang, dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Tongas yang mencapai 1.008 peserta didik.

Tabel 2.12
Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini
Dan Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024

| No | Kecamatan | KB | TPA | SPS | PKBM | SKB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Bantaran | 129 | | 147 | | 733 |
| **2** | Banyuanyar | 1.101 | | 130 | | 87 |
| **3** | Besuk | 667 | | 123 | | 308 |
| **4** | Dringu | 190 | 2 | 226 | | 190 |
| **5** | Gading | 1.176 | | 108 | | 369 |
| **6** | Gending | 424 | | 76 | | 278 |
| **7** | Kotaanyar | 570 | | 208 | | 83 |
| **8** | Kraksaan | 646 | 65 | 98 | 1.025 | 43 |
| **9** | Krejengan | 196 | | 291 | | |
| **10** | Krucil | 755 | | 287 | | 810 |
| **11** | Kuripan | 251 | | | | 296 |
| **12** | Leces | 204 | | 47 | | 367 |
| **13** | Lumbang | 213 | | 31 | | |
| **14** | Maron | 341 | | 869 | | 497 |
| **15** | Paiton | 977 | 36 | 305 | | 392 |
| **16** | Pajarakan | 413 | | 236 | | |
| **17** | Pakuniran | 874 | | 155 | | 158 |
| **18** | Sukapura | 146 | | 38 | | 163 |
| **19** | Sumber | | | | | |
| **20** | Sumberasih | 324 | | 24 | | 276 |
| **21** | Tegalsiwalan | 273 | | 50 | | |
| **22** | Tiris | 794 | | 421 | | 156 |
| **23** | Tongas | 110 | 21 | 175 | | 1.008 |
| **24** | Wonomerto | 323 | | 112 | | - |
| **Jumlah** | | **11.097** | **124** | **4.157** | **1.025** | **6.214** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

5. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tenaga pendidik dan kependidikan tersebar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

Jumlah tenaga pendidik di jenjang TK mencapai 1.083 orang yang memiliki kualifikasi D4/S1, sedangkan 100 guru masih berpendidikan D1/D2,

dan 436 guru masih berpendidikan SD hingga SMA. Kecamatan dengan jumlah tenaga pendidik TK terbanyak adalah Kraksaan dengan 115 guru, diikuti oleh Paiton (131 guru) dan Maron (73 guru). Selain itu, terdapat 7 guru dengan kualifikasi S2/S3 yang tersebar di beberapa kecamatan.

Tabel 2.13

Jumlah tenaga pendidik Taman Kanak Kanak

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Kecamatan | SD s/d SMA | TK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D1/D2 | D3 | D4/S1 | S2/S3 |
| **1** | Bantaran | 15 | 2 | | 23 | |
| **2** | Banyuanyar | 21 | - | | 52 | |
| **3** | Besuk | 15 | 5 | | 61 | |
| **4** | Dringu | 8 | 2 | | 65 | |
| **5** | Gading | 30 | 8 | | 48 | 1 |
| **6** | Gending | 13 | 2 | | 58 | |
| **7** | Kotaanyar | 11 | 7 | | 47 | |
| **8** | Kraksaan | 46 | 6 | 1 | 115 | |
| **9** | Krejengan | 7 | 1 | | 31 | |
| **10** | Krucil | 20 | 4 | | 11 | |
| **11** | Kuripan | 11 | 1 | 1 | 8 | |
| **12** | Leces | 27 | 5 | 1 | 57 | |
| **13** | Lumbang | 7 | 1 | | 26 | |
| **14** | Maron | 26 | 4 | | 73 | |
| **15** | Paiton | 16 | 7 | | 131 | 3 |
| **16** | Pajarakan | 7 | 8 | | 40 | 1 |
| **17** | Pakuniran | 23 | 3 | | 64 | |
| **18** | Sukapura | 1 | 2 | | 14 | 1 |
| **19** | Sumber | 15 | 9 | | 4 | |
| **20** | Sumberasih | 13 | 6 | | 60 | 1 |
| **21** | Tegalsiwalan | 19 | 1 | | 25 | |
| **22** | Tiris | 49 | 3 | | 30 | |
| **23** | Tongas | 27 | 12 | | 15 | |
| **24** | Wonomerto | 9 | 1 | | 25 | |
| **Jumlah** | | **436** | **100** | **3** | **1.083** | **7** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Jumlah tenaga pendidik di jenjang SD jauh lebih besar dibandingkan TK, dengan 4.701 guru yang telah memiliki kualifikasi D4/S1 dan 184 guru bergelar S2/S3. Namun, masih terdapat 133 guru dengan kualifikasi SD hingga SMA, serta 44 guru dengan pendidikan D1/D2. Kecamatan dengan

jumlah guru SD terbanyak adalah Kraksaan (324 guru), disusul oleh Paiton (308 guru) dan Tiris (289 guru)

Tabel 2.14

Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Dasar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Kecamatan | SD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD s/d SMA | D1/D2 | D3 | D4/S1 | S2/S3 |
| **1** | Bantaran | 1 | 1 | | 164 | 8 |
| **2** | Banyuanyar | 5 | 2 | | 149 | 11 |
| **3** | Besuk | 2 | | | 201 | 7 |
| **4** | Dringu | 2 | 2 | | 186 | 13 |
| **5** | Gading | 9 | 1 | | 200 | 2 |
| **6** | Gending | 7 | | | 171 | 6 |
| **7** | Kotaanyar | 5 | | | 145 | 9 |
| **8** | Kraksaan | 17 | 7 | 1 | 324 | 17 |
| **9** | Krejengan | - | 2 | | 174 | 7 |
| **10** | Krucil | 3 | 1 | | 233 | 8 |
| **11** | Kuripan | 1 | 1 | | 169 | 4 |
| **12** | Leces | 13 | 4 | 3 | 231 | 5 |
| **13** | Lumbang | 3 | | | 161 | 4 |
| **14** | Maron | 2 | 6 | | 249 | 9 |
| **15** | Paiton | 4 | 1 | | 308 | 13 |
| **16** | Pajarakan | 9 | 2 | | 157 | 12 |
| **17** | Pakuniran | 5 | 2 | | 196 | 5 |
| **18** | Sukapura | 2 | 1 | | 117 | 8 |
| **19** | Sumber | 6 | 2 | | 147 | 1 |
| **20** | Sumberasih | 3 | 1 | | 218 | 6 |
| **21** | Tegalsiwalan | 4 | | | 135 | 6 |
| **22** | Tiris | 25 | 5 | | 289 | 6 |
| **23** | Tongas | 4 | 2 | | 230 | 14 |
| **24** | Wonomerto | 1 | 1 | | 147 | 3 |
| **Jumlah** | | **133** | **44** | **4** | **4.701** | **184** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Pada jenjang SMP, jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi D4/S1 sebanyak 1.940 guru, sementara 177 guru telah menempuh pendidikan S2/S3. Sebagian tenaga pendidik lainnya masih memiliki kualifikasi SD hingga SMA (134 guru) dan D1/D2 (9 guru). Kecamatan Kraksaan memiliki

jumlah guru terbanyak dengan 179 tenaga pendidik, diikuti oleh Paiton (158 guru) dan Maron (130 guru).

Tabel 2.15
Jumlah Tenaga Pendidik SMP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024

| No | Kecamatan | SMP | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD s/d SMA | D1/D2 | D3 | D4/S1 | S2/S3 |
| **1** | Bantaran | 10 | | | 52 | 4 |
| **2** | Banyuanyar | 13 | | | 105 | 7 |
| **3** | Besuk | - | 1 | | 67 | 7 |
| **4** | Dringu | - | | | 55 | 5 |
| **5** | Gading | 13 | | | 79 | 4 |
| **6** | Gending | 1 | 1 | | 62 | 16 |
| **7** | Kotaanyar | 3 | | | 47 | 1 |
| **8** | Kraksaan | 8 | | | 179 | 24 |
| **9** | Krejengan | 1 | | 1 | 65 | 10 |
| **10** | Krucil | 5 | | | 58 | - |
| **11** | Kuripan | 5 | | | 46 | 4 |
| **12** | Leces | 6 | 1 | 1 | 96 | 10 |
| **13** | Lumbang | 3 | 1 | | 59 | 6 |
| **14** | Maron | 6 | 2 | 1 | 130 | 10 |
| **15** | Paiton | 3 | | | 158 | 11 |
| **16** | Pajarakan | 7 | | | 99 | 7 |
| **17** | Pakuniran | 8 | 1 | | 93 | 9 |
| **18** | Sukapura | 5 | | | 78 | 3 |
| **19** | Sumber | - | | | 53 | 3 |
| **20** | Sumberasih | 4 | 1 | | 96 | 4 |
| **21** | Tegalsiwalan | 3 | | 1 | 54 | 3 |
| **22** | Tiris | 24 | 1 | | 83 | 13 |
| **23** | Tongas | 5 | | 1 | 74 | 9 |
| **24** | Wonomerto | 1 | | | 52 | 7 |
| **Jumlah** | | **134** | **9** | **5** | **1.940** | **177** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

6. Kualifikasi Tenaga Pendidik

Dlam meningkatkan kualitas pembelajaran, dibutuhkan Proporsi pendidik berijazah minimal S1/D4 dihitung berdasarkan jumlah pendidik

yang memiliki ijazah S1/D4, S2, dan S3, dibandingkan dengan total pendidik di seluruh satuan pendidikan formal maupun nonformal.

Pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), proporsi pendidik berijazah minimal S1/D4 di Kabupaten Probolinggo mencapai 66,91%. Kecamatan dengan persentase tertinggi adalah Dringu (86,67%), diikuti oleh Paiton (85,35%), dan Sukapura (83,33%). Sebaliknya, kecamatan dengan persentase terendah adalah Sumber (14,29%), Krucil (31,43%), dan Tongas (27,78%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pendidik TK di beberapa kecamatan masih belum memiliki kualifikasi minimal S1/D4, sehingga peningkatan kompetensi guru menjadi kebutuhan mendesak.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), proporsi pendidik dengan ijazah S1/D4 jauh lebih tinggi dibandingkan TK, yaitu mencapai 96,30%. Kecamatan dengan proporsi tertinggi adalah Besuk (99,01%), diikuti oleh Krejengan (98,86%), dan Bantaran (98,80%). Kecamatan dengan proporsi terendah adalah Tiris (90,60%), Kraksaan (92,86%), dan Leces (92,13%), meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Secara umum, tenaga pendidik di jenjang SD sudah memenuhi standar kualifikasi akademik yang cukup baik.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), proporsi pendidik berijazah minimal S1/D4 mencapai 6,28%, yang merupakan angka terendah dibandingkan jenjang TK dan SD. Kecamatan dengan proporsi tertinggi adalah Banyuanyar (13,71%), Pajarakan (10,67%), dan Sukapura (9,92%). Sementara itu, kecamatan dengan proporsi terendah adalah Sumber (0,67%), Besuk (3,37%), dan Kuripan (5,03%).

Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pendidik SD telah memiliki kualifikasi minimal S1/D4, pada jenjang TK dan SMP masih terdapat kesenjangan yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik, khususnya melalui program sertifikasi, pelatihan, serta kebijakan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi standar minimal.

Berikut Daftar Proporsi Pendidik Berijazah Minimal S1/D4 :

Tabel 2.20

Proporsi Pendidik Berijazah Minimal S1/D4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Kecamatan | TK | | | SD | | | SMP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Min S1/DIV | Belum S1/DIV | % | Min S1/DIV | Belum S1/DIV | % | Min S1/DIV | Belum S1/DIV | % |
| **1** | Bantaran | 23 | 17 | 57.50% | 164 | 2 | 98.80% | 18 | 165 | 9.84% |
| **2** | Banyuanyar | 52 | 21 | 71.23% | 149 | 7 | 95.51% | 24 | 151 | 13.71% |
| **3** | Besuk | 61 | 20 | 75.31% | 201 | 2 | 99.01% | 7 | 201 | 3.37% |
| **4** | Dringu | 65 | 10 | 86.67% | 186 | 4 | 97.89% | 13 | 188 | 6.47% |
| **5** | Gading | 49 | 38 | 56.32% | 200 | 10 | 95.24% | 15 | 201 | 6.94% |
| **6** | Gending | 58 | 15 | 79.45% | 171 | 7 | 96.07% | 7 | 171 | 3.93% |
| **7** | Kotaanyar | 47 | 18 | 72.31% | 145 | 5 | 96.67% | 12 | 145 | 7.64% |
| **8** | Kraksaan | 115 | 53 | 68.45% | 325 | 25 | 92.86% | 25 | 332 | 7.00% |
| **9** | Krejengan | 31 | 8 | 79.49% | 174 | 2 | 98.86% | 8 | 176 | 4.35% |
| **10** | Krucil | 11 | 24 | 31.43% | 233 | 4 | 98.31% | 13 | 234 | 5.26% |
| **11** | Kuripan | 8 | 13 | 38.10% | 169 | 2 | 98.83% | 9 | 170 | 5.03% |
| **12** | Leces | 57 | 33 | 63.33% | 234 | 20 | 92.13% | 11 | 238 | 4.42% |
| **13** | Lumbang | 26 | 8 | 76.47% | 161 | 3 | 98.17% | 7 | 161 | 4.17% |
| **14** | Maron | 73 | 30 | 70.87% | 249 | 8 | 96.89% | 15 | 255 | 5.56% |
| **15** | Paiton | 134 | 23 | 85.35% | 308 | 5 | 98.40% | 16 | 309 | 4.92% |
| **16** | Pajarakan | 41 | 15 | 73.21% | 157 | 11 | 93.45% | 19 | 159 | 10.67% |
| **17** | Pakuniran | 64 | 26 | 71.11% | 196 | 7 | 96.55% | 13 | 198 | 6.16% |
| **18** | Sukapura | 15 | 3 | 83.33% | 117 | 3 | 97.50% | 13 | 118 | 9.92% |
| **19** | Sumber | 4 | 24 | 14.29% | 147 | 8 | 94.84% | 1 | 149 | 0.67% |
| **20** | Sumberasih | 61 | 19 | 76.25% | 218 | 4 | 98.20% | 10 | 219 | 4.37% |
| **21** | Tegalsiwalan | 25 | 20 | 55.56% | 135 | 4 | 97.12% | 9 | 135 | 6.25% |
| **22** | Tiris | 30 | 52 | 36.59% | 289 | 30 | 90.60% | 30 | 294 | 9.26% |
| **23** | Tongas | 15 | 39 | 27.78% | 230 | 6 | 97.46% | 19 | 232 | 7.57% |
| **24** | Wonomerto | 25 | 10 | 71.43% | 147 | 2 | 98.66% | 4 | 148 | 2.63% |
| | **Jumlah** | **1090** | **539** | **66.91%** | **4705** | **181** | **96.30%** | **318** | **4749** | **6.28%** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Selain tenaga pendidik yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), terdapat tenaga pendidik di bawah Kementerian Agama yang bertugas di Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan data yang tersedia, mayoritas tenaga pendidik telah memiliki kualifikasi S1/S2, sedangkan tidak terdapat tenaga pendidik dengan kualifikasi SD/SMA maupun D1/D3.

Pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), terdapat 4.761 tenaga pendidik dengan jumlah tertinggi di Tiris (533 guru), diikuti oleh Krucil (446

guru) dan Gading (438 guru). Hal ini menunjukkan bahwa MI memiliki tenaga pengajar terbanyak dibandingkan jenjang lainnya.

Untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs), tercatat 2.763 tenaga pendidik, dengan jumlah tertinggi di Paiton (338 guru), diikuti oleh Kraksaan (239 guru) dan Gading (175 guru). Jumlah ini menggambarkan tingginya partisipasi tenaga pendidik dalam pendidikan menengah berbasis keagamaan.

Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA), terdapat 1.877 tenaga pendidik, dengan jumlah tertinggi di Paiton (295 guru), disusul oleh Kraksaan (198 guru) dan Pajarakan (180 guru).

Sementara itu, untuk Raudhatul Athfal (RA), total tenaga pendidik tercatat 1.725 guru, dengan jumlah tertinggi di Gading (169 guru) dan Tiris (141 guru).

Berikut adalah jumlah pendidik pada satuan pendidikan di bawah naungan kementerian Agama Kabupaten Probolinggo :

Tabel 2.16
Jumlah Pendidik Pada Satuan Pendidikan Di Bawah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024

| No | Kecamatan | RA | | | MI | | | MTS | | | MA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD s/d SMA | D1/D3 | S1/S2 | SD s/d SMA | D1/D3 | S1/S2 | SD s/d SMA | D1/D3 | S1/S2 | SD s/d SMA | D1/D3 | S1/S2 |
| **1** | Bantaran | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 74 |
| **2** | Banyuanyar | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 88 |
| **3** | Besuk | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 47 |
| **4** | Dringu | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 |
| **5** | Gading | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 78 |
| **6** | Gending | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 90 |
| **7** | Kotaanyar | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 46 |
| **8** | Kraksaan | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 198 |
| **9** | Krejengan | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 119 |
| **10** | Krucil | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 86 |
| **11** | Kuripan | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 13 |
| **12** | Leces | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 100 |
| **13** | Lumbang | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 38 |
| **14** | Maron | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 96 |
| **15** | Paiton | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 295 |
| **16** | Pajarakan | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 180 |
| **17** | Pakuniran | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 78 |
| **18** | Sukapura | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | Sumber | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | Sumberasih | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 38 |
| **21** | Tegalsiwalan | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 86 |
| **22** | Tiris | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 70 |
| **23** | Tongas | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 25 |
| **24** | Wonomerto | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 13 |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **1725** | **0** | **0** | **4761** | **0** | **0** | **2763** | **0** | **0** | **1877** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Rasio guru terhadap siswa merupakan salah satu indikator kualitas pendidikan dalam memastikan efektivitas proses pembelajaran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio ideal jumlah peserta didik terhadap guru berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Semakin kecil rasio, maka semakin optimal perhatian dan pembelajaran yang dapat diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik.

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), rata-rata rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Probolinggo adalah 1:23, dengan variasi di setiap kecamatan. Kecamatan dengan rasio tertinggi adalah Sumberasih (1:41) dan Leces (1:36), sedangkan kecamatan dengan rasio terendah adalah Pakuniran (1:13) dan Gading (1:14).

Sementara itu, pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), rata-rata rasio guru terhadap siswa lebih kecil, yaitu 1:13, yang menunjukkan bahwa guru TK memiliki lebih sedikit siswa dibandingkan guru PAUD. Kecamatan dengan rasio tertinggi adalah Tongas (1:20) dan Wonomerto (1:18), sementara kecamatan dengan rasio terendah adalah Pakuniran dan Kotaanyar (1:7).

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), rata-rata rasio guru terhadap siswa adalah 1:14, yang masih dalam kategori cukup ideal. Kecamatan dengan rasio tertinggi adalah Sumberasih (1:21) dan Gending (1:16), sementara kecamatan dengan rasio terendah adalah Gading, Krejengan, dan Pakuniran (1:10).

Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), rata-rata rasio guru terhadap siswa adalah 1:13, menunjukkan bahwa beban mengajar guru masih cukup terdistribusi dengan baik. Kecamatan dengan rasio tertinggi adalah Gending dan Dringu (1:19), sementara kecamatan dengan rasio terendah adalah Pakuniran dan Sukapura (1:8-9).

Tabel 2.17

Rasio Guru Terhadap Siswa

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Kecamatan | Rasio Guru/Siswa | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PAUD | TK | SD | SMP |
| **1** | Bantaran | 28 | 14 | 15 | 11 |
| **2** | Banyuanyar | 19 | 11 | 13 | 10 |
| **3** | Besuk | 21 | 11 | 11 | 15 |
| **4** | Dringu | 29 | 16 | 17 | 18 |
| **5** | Gading | 14 | 9 | 10 | 11 |
| **6** | Gending | 34 | 12 | 16 | 19 |
| **7** | Kotaanyar | 14 | 7 | 11 | 9 |
| **8** | Kraksaan | 26 | 11 | 15 | 16 |
| **9** | Krejengan | 19 | 13 | 10 | 14 |
| **10** | Krucil | 19 | 16 | 13 | 12 |
| **11** | Kuripan | 25 | 16 | 12 | 10 |
| **12** | Leces | 36 | 15 | 16 | 14 |
| **13** | Lumbang | 35 | 17 | 14 | 10 |
| **14** | Maron | 16 | 12 | 13 | 19 |
| **15** | Paiton | 24 | 11 | 12 | 16 |
| **16** | Pajarakan | 27 | 14 | 12 | 14 |
| **17** | Pakuniran | 13 | 7 | 10 | 8 |
| **18** | Sukapura | 15 | 14 | 12 | 9 |
| **19** | Sumber | - | 13 | 14 | 12 |
| **20** | Sumberasih | 41 | 15 | 21 | 18 |
| **21** | Tegalsiwalan | 19 | 11 | 15 | 12 |
| **22** | Tiris | 19 | 11 | 12 | 12 |
| **23** | Tongas | 35 | 20 | 19 | 15 |
| **24** | Wonomerto | 33 | 18 | 15 | 13 |
| **Jumlah** | | **23** | **13** | **14** | **13** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Dapat disimpulkan bahwa rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Probolinggo masih cukup ideal di semua jenjang pendidikan, dengan rata-rata berada dalam batas yang dapat diterima berdasarkan standar nasional. Namun, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki rasio cukup tinggi, seperti Sumberasih dan Leces di jenjang PAUD, yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, pemerataan tenaga

pendidik tetap perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan perhatian dan pembelajaran yang optimal.

7. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Kabupaten Probolinggo memiliki berbagai fasilitas pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan, termasuk ruang kelas pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data berikut memberikan gambaran kondisi ruang kelas berdasarkan kategori baik, rusak ringan, dan rusak sedang, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Kabupaten Probolinggo memiliki total 3,381 ruang kelas SD, dengan 1,532 ruang kelas dalam kondisi baik, 735 ruang kelas mengalami kerusakan ringan, dan 429 ruang mengalami rusak sedang dan 609 ruang rusak berat.

Tabel 2.18
Kondisi Ruang Kelas SD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024

| No | Kecamatan | SD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
| 1 | Bantaran | 132 | 10 | 9 | 18 | 39 |
| 2 | Banyuanyar | 114 | 27 | 20 | 28 | 39 |
| 3 | Besuk | 126 | 69 | 22 | 13 | 22 |
| 4 | Dringu | 138 | 36 | 51 | 17 | 34 |
| 5 | Gading | 156 | 67 | 3 | 20 | 29 |
| 6 | Gending | 117 | 110 | 3 | 11 | 10 |
| 7 | Kotaanyar | 96 | 46 | 30 | 8 | 12 |
| 8 | Kraksaan | 162 | 55 | 64 | 20 | 23 |
| 9 | Krejengan | 120 | 45 | 41 | 25 | 9 |
| 10 | Krucil | 198 | 117 | 20 | 27 | 34 |
| 11 | Kuripan | 156 | 83 | 29 | 23 | 21 |
| 12 | Leces | 132 | 85 | 27 | 11 | 9 |
| 13 | Lumbang | 132 | 68 | 24 | 13 | 27 |
| 14 | Maron | 156 | 65 | 26 | 15 | 50 |
| 15 | Paiton | 168 | 81 | 51 | 20 | 16 |
| 16 | Pajarakan | 102 | 36 | 35 | 10 | 21 |

| No | Kecamatan | SD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
| 17 | Pakuniran | 138 | 65 | 23 | 20 | 30 |
| 18 | Sukapura | 114 | 50 | 26 | 12 | 26 |
| 19 | Sumber | 138 | 57 | 56 | 14 | 11 |
| 20 | Sumberasih | 162 | 104 | 21 | 13 | 24 |
| 21 | Tegalsiwalan | 114 | 55 | 36 | 10 | 13 |
| 22 | Tiris | 228 | 93 | 46 | 39 | 50 |
| 23 | Tongas | 162 | 52 | 45 | 25 | 40 |
| 24 | Wonomerto | 120 | 56 | 27 | 17 | 20 |
| **Jumlah** | | **3.381** | **1.532** | **735** | **429** | **609** |

*Sumber Data : Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 2024*

Untuk jenjang SMP, terdapat 1.546 ruang kelas, dengan 1.440 ruang kelas dalam kondisi baik, 6 ruang kelas mengalami kerusakan ringan, 56 ruang kelas mengalami kerusakan sedang dan 44 Ruang mengalami kerusakan berat/total

Tabel 2.19

Kondisi Ruang Kelas SMP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No | Kecamatan | SMP | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
| **1** | Bantaran | 38 | 34 | - | | 4 |
| **2** | Banyuanyar | 75 | 73 | - | - | 2 |
| **3** | Besuk | 52 | 46 | - | 3 | 3 |
| **4** | Dringu | 38 | 38 | - | | - |
| **5** | Gading | 65 | 61 | - | 4 | - |
| **6** | Gending | 64 | 61 | - | 3 | - |
| **7** | Kotaanyar | 32 | 30 | - | - | 2 |
| **8** | Kraksaan | 151 | 145 | - | 3 | 3 |
| **9** | Krejengan | 65 | 65 | - | - | - |
| **10** | Krucil | 44 | 38 | - | 3 | 3 |
| **11** | Kuripan | 28 | 25 | - | 3 | - |
| **12** | Leces | 75 | 69 | 3 | - | 3 |
| **13** | Lumbang | 42 | 37 | - | - | 5 |
| **14** | Maron | 94 | 89 | - | 2 | 3 |
| **15** | Paiton | 116 | 111 | - | 3 | 2 |

| No | Kecamatan | SMP | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
| **16** | Pajarakan | 69 | 69 | - | - | - |
| **17** | Pakuniran | 65 | 59 | 1 | 5 | - |
| **18** | Sukapura | 61 | 49 | 2 | 7 | 3 |
| **19** | Sumber | 34 | 31 | - | 3 | - |
| **20** | Sumberasih | 74 | 68 | - | 4 | 2 |
| **21** | Tegalsiwalan | 44 | 38 | - | 3 | 3 |
| **22** | Tiris | 108 | 102 | - | 4 | 2 |
| **23** | Tongas | 73 | 69 | - | 3 | 1 |
| **24** | Wonomerto | 39 | 33 | - | 3 | 3 |
| **Jumlah** | | **1.546** | **1.440** | **6** | **56** | **44** |

*Sumber Data : Data Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 2024*

8. Akreditasi Satuan Pendidikan

Akreditasi satuan pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kelayakan dan kualitas sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012, akreditasi sekolah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Akreditasi ini diberikan dengan kategori A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), dan TT (Tidak Terakreditasi).

Kabupaten Probolinggo memiliki satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi mencapai 355 sekolah dengan akreditasi B, sementara 180 sekolah terakreditasi C dan 37 sekolah terakreditasi A. Kecamatan Gading memiliki jumlah PAUD terakreditasi tertinggi (42 sekolah B, 20 sekolah C, dan 2 sekolah A), sementara beberapa kecamatan masih memiliki sekolah PAUD dengan status belum terakreditasi.

Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), sebanyak 429 sekolah mendapatkan akreditasi B, 157 sekolah berakreditasi C, dan 32 sekolah berakreditasi A. Kecamatan dengan jumlah SD terakreditasi tertinggi adalah Kraksaan (31 sekolah B, 2 sekolah C, dan 4 sekolah A). Namun, masih ada beberapa sekolah yang belum terakreditasi, meskipun jumlahnya relatif kecil.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), terdapat 72 sekolah berakreditasi B, 91 sekolah berakreditasi C, dan 45 sekolah

berakreditasi A. Kecamatan dengan jumlah SMP terakreditasi tertinggi adalah Kraksaan (12 sekolah B, 2 sekolah C, dan 3 sekolah A). Namun, beberapa kecamatan masih memiliki sekolah yang belum terakreditasi, sehingga perlu adanya upaya peningkatan mutu sekolah.

Sementara itu, untuk Pendidikan Kesetaraan, jumlah sekolah yang telah mendapatkan akreditasi masih sangat terbatas, dengan 4 sekolah terakreditasi B, 1 sekolah terakreditasi C, dan hanya 1 sekolah berakreditasi A. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan evaluasi lebih lanjut terhadap lembaga pendidikan kesetaraan.

Berikut data akreditasi satuan pendidikan di Kabupaten Probolinggo pada berbagai jenjang pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan :

Tabel 2.21
Akreditasi Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024

| No | Kecamatan | Jumlah PAUD Terakreditasi (Negeri dan Swasta) | | | | Jumlah SD (Negeri dan Swasta) Terakreditasi | | | | Jumlah SMP (Negeri dan Swasta) Terakreditasi | | | | Jumlah Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi (Negeri dan Swasta) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | TT | A | B | C | TT | A | B | C | TT | A | B | C | TT |
| **1** | Bantaran | | 13 | 8 | 7 | | 18 | 6 | | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 |
| **2** | Banyuanyar | 1 | 14 | 5 | 46 | | 16 | 5 | | 2 | 5 | 6 | 3 | | | | 1 |
| **3** | Besuk | 1 | 25 | 11 | 20 | 1 | 19 | 3 | | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 |
| **4** | Dringu | 2 | 18 | 6 | 19 | 6 | 17 | | | 2 | | | | | | | 1 |
| **5** | Gading | 2 | 42 | 20 | 10 | | 12 | 16 | | 1 | 5 | 4 | 1 | | 1 | | 1 |
| **6** | Gending | 1 | 8 | 12 | 18 | 3 | 18 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | 2 |
| **7** | Kotaanyar | | 6 | 9 | 35 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 |
| **8** | Kraksaan | 10 | 22 | 6 | 29 | 4 | 31 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | | | | 1 |
| **9** | Krejengan | | 20 | 6 | 14 | | 17 | 5 | | 2 | 4 | 5 | | | | | |
| **10** | Krucil | | 4 | 10 | 37 | 2 | 15 | 17 | | 1 | 2 | 4 | 1 | | | 1 | |
| **11** | Kuripan | | 7 | 2 | 8 | | 13 | 13 | | | 2 | 4 | | | | | 1 |
| **12** | Leces | 1 | 18 | 5 | 28 | | 24 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | | | | |
| **13** | Lumbang | | 4 | 2 | 25 | | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | 1 | | |
| **14** | Maron | 1 | 24 | 10 | 42 | 2 | 20 | 6 | | 4 | 4 | 5 | | 1 | | | 1 |
| **15** | Paiton | 10 | 28 | 15 | 23 | 3 | 24 | 2 | 1 | 5 | 3 | | | | | | 2 |
| **16** | Pajarakan | | 13 | 17 | 10 | 1 | 17 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| **17** | Pakuniran | 1 | 10 | 11 | 39 | 2 | 16 | 8 | | 2 | 3 | 7 | | | | | 1 |
| **18** | Sukapura | 3 | 4 | 2 | 13 | | 17 | 4 | | 1 | 2 | 6 | | | | | 1 |
| **19** | Sumber | | | 3 | 13 | 1 | 10 | 12 | | 1 | 1 | 3 | | | | | |
| **20** | Sumberasih | | 20 | 3 | 21 | 2 | 24 | 4 | | 2 | 3 | 5 | | | | | 1 |
| **21** | Tegalsiwalan | 1 | 9 | | 20 | 1 | 13 | 8 | | 2 | 1 | 2 | | | | | |
| **22** | Tiris | | 18 | 7 | 42 | 1 | 25 | 17 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | | | | 2 |
| **23** | Tongas | | 12 | 7 | 27 | 1 | 23 | 6 | | 2 | 2 | 6 | | | 1 | | |
| **24** | Wonomerto | 3 | 16 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | 1 |
| | **Jumlah** | **37** | **355** | **180** | **550** | **32** | **429** | **157** | **8** | **45** | **72** | **91** | **10** | **1** | **4** | **1** | **20** |

*Sumber Data : Data pokok Pendidikan 2024*

Proporsi jumlah satuan pendidikan yang telah terakreditasi minimal B menjadi salah satu ukuran keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo.

Pada jenjang PAUD, hanya 34,94% satuan pendidikan yang telah terakreditasi minimal B, dengan kecamatan Wonomerto memiliki proporsi tertinggi (73,08%), sementara Sumber memiliki 0% PAUD terakreditasi minimal B.

Untuk jenjang SD, sebanyak 73,64% sekolah telah mendapatkan akreditasi minimal B. Kecamatan Dringu dan Gending mencapai 100% akreditasi minimal B, sementara Sumber memiliki proporsi terendah (47,83%).

Pada jenjang SMP, sekitar 53,67% sekolah telah memiliki akreditasi minimal B. Kecamatan dengan persentase tertinggi adalah Paiton dan Dringu (100%), sedangkan Kuripan dan Wonomerto memiliki proporsi terendah (33,33%).

Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar satuan pendidikan telah memperoleh akreditasi yang baik, masih terdapat kesenjangan di beberapa kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan, baik dari segi sarana prasarana, kurikulum, maupun tenaga pendidik, agar seluruh sekolah di Kabupaten Probolinggo dapat memenuhi standar nasional pendidikan yang lebih baik.

Berikut data proporsi jumlah satuan pendidikan yang telah terakreditasi minimal B di Kabupaten Probolinggo pada berbagai jenjang pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan :

Tabel 2.22
Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Yang Telah Terakreditasi Minimal
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2024

| No | Kecamatan | PAUD | | | SD | | | SMP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Akreditasi Min B | Belum Akreditasi Minimal B | % | Akreditasi Min B | Belum Akreditasi Minimal B | % | Akreditasi Min B | Belum Akreditasi Minimal B | % |
| **1** | Bantaran | 13 | 15 | 46.43% | 18 | 6 | 75.00% | 3 | 5 | 37.50% |
| **2** | Banyuanyar | 15 | 51 | 22.73% | 16 | 5 | 76.19% | 7 | 9 | 43.75% |
| **3** | Besuk | 26 | 31 | 45.61% | 20 | 3 | 86.96% | 4 | 2 | 66.67% |
| **4** | Dringu | 20 | 25 | 44.44% | 23 | - | 100.00% | 2 | - | 100.00% |
| **5** | Gading | 44 | 30 | 59.46% | 12 | 16 | 42.86% | 6 | 5 | 54.55% |
| **6** | Gending | 9 | 30 | 23.08% | 21 | - | 100.00% | 4 | 2 | 66.67% |
| **7** | Kotaanyar | 6 | 44 | 12.00% | 14 | 3 | 82.35% | 4 | - | 100.00% |
| **8** | Kraksaan | 32 | 35 | 47.76% | 35 | 3 | 92.11% | 15 | 3 | 83.33% |
| **9** | Krejengan | 20 | 20 | 50.00% | 17 | 5 | 77.27% | 6 | 5 | 54.55% |
| **10** | Krucil | 4 | 47 | 7.84% | 17 | 17 | 50.00% | 3 | 5 | 37.50% |
| **11** | Kuripan | 7 | 10 | 41.18% | 13 | 13 | 50.00% | 2 | 4 | 33.33% |
| **12** | Leces | 19 | 33 | 36.54% | 24 | 7 | 77.42% | 4 | 7 | 36.36% |
| **13** | Lumbang | 4 | 27 | 12.90% | 13 | 10 | 56.52% | 2 | 6 | 25.00% |
| **14** | Maron | 25 | 52 | 32.47% | 22 | 6 | 78.57% | 8 | 5 | 61.54% |
| **15** | Paiton | 38 | 38 | 50.00% | 27 | 3 | 90.00% | 8 | - | 100.00% |
| **16** | Pajarakan | 13 | 27 | 32.50% | 18 | 2 | 90.00% | 5 | 1 | 83.33% |
| **17** | Pakuniran | 11 | 50 | 18.03% | 18 | 8 | 69.23% | 5 | 7 | 41.67% |
| **18** | Sukapura | 7 | 15 | 31.82% | 17 | 4 | 80.95% | 3 | 6 | 33.33% |
| **19** | Sumber | - | 16 | 0.00% | 11 | 12 | 47.83% | 2 | 3 | 40.00% |
| **20** | Sumberasih | 20 | 24 | 45.45% | 26 | 4 | 86.67% | 5 | 5 | 50.00% |
| **21** | Tegalsiwalan | 10 | 20 | 33.33% | 14 | 8 | 63.64% | 3 | 2 | 60.00% |
| **22** | Tiris | 18 | 49 | 26.87% | 26 | 18 | 59.09% | 10 | 9 | 52.63% |
| **23** | Tongas | 12 | 34 | 26.09% | 24 | 6 | 80.00% | 4 | 6 | 40.00% |
| **24** | Wonomerto | 19 | 7 | 73.08% | 15 | 6 | 71.43% | 2 | 4 | 33.33% |
| **Jumlah** | | **392** | **730** | **34.94%** | **461** | **165** | **73.64%** | **117** | **101** | **53.67%** |

9. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu yang mendapat perhatian di Kabupaten Probolinggo, yang mencakup upaya pelestarian cagar budaya, pemajuan kebudayaan, pengelolaan museum, serta sumber daya manusia dan sarana prasarana terkait.

a. Pelestarian Cagar Budaya

Pelestarian cagar budaya di Kabupaten Probolinggo dilakukan melalui tahapan yang terintegratif, mulai dari pendataan, penetapan, hingga pemanfaatan. Data menunjukkan bahwa terdapat total 171 cagar budaya yang terdata, terdiri dari berbagai jenis seperti benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan.

Berikut rincian data cagar budaya yang telah ditetapkan, diselamatkan/dipelihara, diteliti/direvitalisasi, dan dimanfaatkan:

Tabel 2. 24
Pelestarian Cagar Budaya
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024

| No. | Jenis Cagar Budaya | Jumlah Ditetapkan | Jumlah Diselamatkan/Dipelihara | Jumlah Diteliti/Direvitalisasi | Jumlah Dimanfaatkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benda Cagar Budaya | - | - | - | - |
| 2. | Bangunan Cagar Budaya | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3. | Struktur Cagar Budaya | 5 | 2 | 5 | - |
| 4. | Situs Cagar Budaya | 5 | 2 | 2 | - |
| 5. | Kawasan Cagar Budaya | 2 | 2 | - | - |
| **Total** | | **15** | **9** | **10** | **2** |

*Data Bidang Kebudayaan tahun 2024*

b. Pemajuan Kebudayaan

Upaya pemajuan kebudayaan berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan objek-objek kebudayaan. Dari total 67 objek pemajuan kebudayaan yang terdata, sebanyak 2 objek telah dikembangkan dan 2

objek telah dimanfaatkan. Seluruh objek yang telah dikembangkan dan dimanfaatkan tersebut berasal dari kategori Seni.

Tabel 2.25
Pemajuan Kebudayaan
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024

| No | Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Terdata | Jumlah Objek Dikembangkan | Jumlah Objek Dimanfaatkan |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Tradisi Lisan | 4 | - | - |
| **2** | Manuskrip | 1 | - | - |
| **3** | Adat Istiadat | 10 | - | - |
| **4** | Permainan Rakyat | 9 | - | - |
| **5** | Olahraga zradisional | 2 | - | - |
| **6** | Pengetahuan Tradisional | 10 | - | - |
| **7** | Teknologi Tradisional | 9 | - | - |
| **8** | Seni | 14 | 2 | 2 |
| **9** | Bahasa | - | - | - |
| **10** | Ritus | 8 | - | - |
| **Total** | | **67** | **2** | **2** |

*Data Bidang Kebudayaan tahun 2024*

c. Pengelolaan Museum

Museum Tengger menjadi salah satu pusat pelestarian dan edukasi kebudayaan. Museum ini memiliki total 18 koleksi, dengan 13 koleksi dalam kondisi baik dan 5 koleksi dalam kondisi cacat. Koleksi yang dimiliki antara lain Patung Roro Anteng Joko Seger, Patung Tari Sodoran, dan berbagai benda lainnya seperti Keris, Tombak, dan Pakaian Adat Khas Tengger.

Tabel 2.26
Pengelolaan Museum
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024

| No | Nama Barang | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Patung Roro Anteng Joko Seger | 2 | Buah | Baik |
| **2** | Patung Tari Sodoran | 1 | Buah | Baik |
| **3** | Patung Ki Dukun Pandita | 1 | Buah | Baik |
| **4** | Keris | 5 | Buah | Baik |
| **5** | Tombak | 4 | Buah | Baik |

| No | Nama Barang | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| **6** | Peralatan Musik Ketipungan | 1 | Set | Baik |
| **7** | Manekin Pengantin Khas Tengger | 1 | Set | Baik |
| **8** | Manekin Pengantin Khas Adat Sumber | 1 | Set | Baik |
| **9** | Pakaian Adat Khas Tengger | 1 | Set | Baik |
| **10** | Topeng | 4 | Buah | Baik |
| **11** | Guci Tanggung | 1 | Buah | Baik |
| **12** | Sonang | 1 | Buah | Cacat |
| **13** | Guci Besar | 1 | Buah | Cacat |
| **14** | Guel Kecil | 1 | Buah | Cacat |
| **15** | Kenteng | 1 | Buah | Cacat |
| **16** | Fosil Dauh | 1 | Buah | Cacat |
| **17** | Dandang Kenteng | 1 | Buah | Baik |
| **18** | Penal (kuwali) | 1 | Buah | Cacat |
| | | 29 | - | - |

*Data Bidang Kebudayaan tahun 2024*

d. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam upaya pelestarian kebudayaan. Terdapat 3 orang sumber daya manusia yang mengelola cagar budaya dan 1 orang yang mengelola museum.

Untuk sarana dan prasarana, tercatat terdapat 1 unit sarana prasarana yang mendukung pengelolaan museum, sementara sarana prasarana untuk cagar budaya masih nihil.

Tabel 2.27

Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024

| No. | Keterangan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| **1.** | SDM Cagar Budaya | 3 | Orang |
| **2.** | SDM Museum | 1 | Orang |
| **3.** | Sarana & Prasarana Cagar Budaya | 0 | Unit |
| **4.** | Sarana & Prasarana Museum | 1 | Unit |

*Data Bidang Kebudayaan tahun 2024*

Secara keseluruhan, data tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki potensi kekayaan budaya yang besar, meskipun masih ada beberapa tantangan dalam hal pemanfaatan dan pelibatan masyarakat.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis terhadap capaian kinerja menjadi landasan esensial untuk menetapkan target yang realistis dan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi strategis pada periode 2025-2029. Evaluasi ini berfokus pada kinerja tahun 2024, yang merupakan tahun pertama dari periode Renstra transisi 2024-2026, dengan membandingkan capaian pada tahun tersebut terhadap target yang ditetapkan serta capaian tahun sebelumnya.

### a. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator kinerja Pembangunan Daerah terdiri tiga dimensi utama,: Dimensi Pendidikan, Kesehatan dan standar Hidup. Dimensi Pendidikan terdiri dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama sekolah (RLS).

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya waktu (dalam tahun) yang diharapkan dapat dijalani oleh seorang anak pada usia tertentu di masa mendatang. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa peluang seorang anak untuk tetap bersekolah pada usia-usia berikutnya akan tetap sama dengan peluang penduduk yang bersekolah pada usia tersebut pada saat ini. Dan digunakan sebagai indikator untuk mengukur kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, yang direpresentasikan melalui lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat aksesibilitas dan keberlanjutan pendidikan di suatu wilayah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan rata-rata waktu (dalam satuan tahun) yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk mengikuti pendidikan formal. Indikator RLS digunakan untuk mengukur kualitas penduduk dalam hal akses dan partisipasi terhadap pendidikan formal.

Dimensi pendidikan menunjukkan peningkatan harapan lama sekolah (HLS) dari 12,35 tahun menjadi 12,64 tahun, sementara rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat dari 6,11 tahun menjadi 6,31 tahun, yang meskipun kecil, mencerminkan akselerasi akses pada pendidikan dasar

Capaian dimensi Pendidikan (Harapan Lama Sekolah-HLS dan Rata-rata Lama Sekolah-RLS) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Tahun 2020-2024

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun) | 12.35 | 12.36 | 12.58 | 12.63 | **12.64** |
| 2. | Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun) | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.29 | 6.31 |

**b. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) Urusan Pemerintah Daerah**

Capaian kinerja urusan pemerintah daerah Adalah hasil atau output yang dipoeroleh dari pelaksanaan tugas dan fungsi suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan sebagaimana diatur dalam pearturan perundang-undangan. Capaian kinerja urusan pemerintah daerah menjawab pertanyaan sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan kewenangannya dalam bidang tertentu. Dalam hal ini capaian diukur menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan.

**a. Urusan Pendidikan**

Urusan pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Secara keseluruhan, urusan pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. Tingkat partisipasi dan kelulusan siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah semakin meningkat, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di tingkat lokal. Perkembangan capaian kinerja urusan pendidikan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat dengan mengacu pada empat indikator kunci hasil. Keempat indikator tersebut menggambarkan partisipasi masyarakat di beberapa kelompok umur dalam berpartisipasi pada jenjang- jenjang pendidikan yang sesuai.

Indikator pertama terkait tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Paud memiliki capaian yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun ke belakang yaitu sebesar 99,54%. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar ditahun 2022-2024 memiliki tren yang fluktuatif dengan capaian tertinggi terjadi tahun 2021 sebesar 103,27%. Capaian terakhir pada tahun 2024 yaitu sebesar 99,77%. Pada Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang menyelesaikan pendidikan menengah pertama memiliki tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Capaian tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 98,58%. Indikator terakhir yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, dimana indikator ini yang mengalami peningkatan sangat drastis dengan capaian terakhir di tahun 2024 yaitu sebesar 94,24%, setelah pada tahun 2020 hanya 5,23%.

Indikator satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca dan numerasi pada tingkat SD dan SMP juga menjadi kinerja kunci urusan pendidikan. Capaian pada indikator tersebut mengalami tren kenaikan, terutama pada indikator satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi pada tingkat SD yang mengalami kenaikan secara signifikan dari 64,56 pada tahun 2023 menjadi 74,31 pada tahun 2024.

Selain akses, kualitas pendidikan juga menjadi perhatian di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan hasil capaian iklim keamanan pada tingkat SD dan SMP, iklim kebhinekaan tingkat SD dan SMP, iklim inklusivitas tingkat SD dan SMP, peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B serta pertumbuhan proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D4 menunjukkan tren peningkatan.

Dari capaian indikator kinerja kunci hasil urusan pendidikan, mengindikasikan bahwa Kabupaten Probolinggo menjadikan pendidikan sebagai pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, harus mampu menjamin kesempatan pendidikan yang sama, kualitas

pengajar, kurikulum sekolah, dan fasilitas pendidikan yang ada di setiap wilayah.

**b. Kebudayaan**

Capaian indikator kinerja kunci bidang kebudayaan Pemerintah Kabupaten Probolinggo menunjukkan fluktuasi signifikan. Pada 2020, capaian indikator sebesar 28 mencerminkan upaya pelestarian cagar budaya yang belum maksimal. Penurunan tajam pada 2021 menjadi 7,14 mungkin disebabkan oleh perubahan cara penghitungan atau faktor eksternal seperti pandemi. Namun, sejak 2022 hingga 2024, capaian mencapai 100, menunjukkan keberhasilan dalam pelestarian cagar budaya, yang kemungkinan besar dipicu oleh kebijakan baru atau inisiatif pelestarian yang lebih intensif. Meskipun ada penurunan pada 2021, capaian menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pelestarian cagar budaya. Persentase Obyek Kebudayaan yang dilestarikan juga mengalami tren peningkatan, hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan upaya pelestarian warisan budaya, yang dapat diartikan sebagai keberhasilan program pelestarian, dukungan masyarakat yang lebih besar, dan potensi untuk mempertahankan identitas budaya.

Pembangunan kebudayaan di daerah mengacu pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). PPKD merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan upaya pemajuan kebudayaan, seperti pelestarian bahasa daerah, adat istiadat, dan objek pemajuan kebudayaan lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun, Nilai Pemantauan dan Evaluasi PPKD Kabupaten Probolinggo sampai dengan tahun 2024 sebagaimana Laporan Pemantauan dan Evaluasi PPKD Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2024 masih 0 (nilai E) disebabkan adanya kendala pengumpulan data / borang.

Kabupaten Probolinggo, sebagai salah satu daerah di Jawa Timur, memiliki kekayaan cagar budaya yang mencakup situs-situs bersejarah seperti Candi Jabung, masjid kuno (misalnya Masjid Genggong dan Masjid Nurul Jadid), gereja tua (seperti GKJW Kraksaan), pura (Pura Luhur Poten untuk ritual Yadnya Kasada), dan bangunan peninggalan Belanda seperti Gedung Pegadaian Kraksaan dan Pabrik Gula

Wonolangan. Situs-situs ini tidak hanya penting untuk sejarah, tetapi juga untuk pariwisata budaya dan identitas lokal. Berdasarkan informasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo 2025-2045, pelestarian cagar budaya merupakan bagian integral dari pembangunan daerah, dengan fokus pada pengembangan pariwisata, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo (Urusan Pendidikan dan Kebudayaan) dapat dilihat dalam tabel berikut.:

Tabel 2.29

Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2020-2024

| No | Urusan Pemerinta han | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | |
| **1** | Pendidikan | 1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi PAUD | Persen | 86,72 | 87,48 | 88,65 | 81,85 | 90,56 |
| | | 2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 97,48 | 103,27 | 98,72 | 99,67 | 99,56 |
| | | 3) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persen | 89,69 | 98,42 | 95,53 | 96,9 | 90,74 |
| | | 4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 5,23 | 7,02 | 10,7 | 31.94 | 33.96 |
| | | 5) Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah pertama | Persen | 93.58.00 | 100.86 | 97,12 | 96.71 | 97.33 |
| | | 6) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | Persen | N/A | N/A | 4,79 | 5,48 | N/A |
| | | 7) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD | Persen | N/A | 53.67 | 64.65 | 73,01 | 77,03 |
| | | 8) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP | Persen | N/A | 53,67 | 60,21 | 66,06 | 70.90 |
| | | 9) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi SD | Persen | N/A | 50,33 | 49,95 | 64,56 | 74,31 |
| | | 10) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi SMP | Persen | N/A | 53.67 | 44,34 | 64,48 | 70,34 |
| | | 11) Proporsi PAUD Akreditasi Min B | Persen | N/A | 79,38 | 69,45 | 63,84 | 63,79 |

| No | Urusan Pemerinta han | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 12) Proporsi Guru PAUD Formal S1/D IV | Persen | N/A | 42,61 | 44,30 | 48,93 | 50,25 |
| | | 13) Iklim Keamanan Pendidikan Dasar | Indeks | N/A | 68,67 | 68,14 | 69,70 | 74,21 |
| | | 14) Iklim Keamanan Pendidikan Menengah Pertama | Indeks | N/A | 70,67 | 65,09 | 65,4 | 67,09 |
| | | 15) Iklim Kebinekaan Pendidikan Dasar | Indeks | N/A | 70 | 67,21 | 71,34 | 71,07 |
| | | 16) Iklim Kebinekaan Pendidikan Menengah Pertama | Indeks | N/A | 71,33 | 63,38 | 68,96 | 68,43 |
| | | 17) Iklim Inklusivitas Pendidikan Dasar | Indeks | N/A | 63,33 | 55,42 | 53,02 | 59,21 |
| | | 18) Iklim Inklusivitas Pendidikan Menengah Pertama | Indeks | N/A | 62,67 | 56 | 53,59 | 55,07 |
| **2** | Kebudayaan | Terlestarikannya Cagar Budaya | Persen | 28 | 7,14 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Obyek Kebudayaan yang dilestarikan | Perse n | N/A | N/A | 28,57 | 42,86 | 57,14 |

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi internal maupun eksternal, teridentifikasi sejumlah tantangan dan peluang strategis yang akan mempengaruhi arah pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dalam periode 2025–2029. Identifikasi ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta program pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan agar lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

**a. Tantangan**

1. Tantangan Internal
    - Kualitas dan Distribusi PTK

      Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) belum merata, khususnya dalam penguasaan pedagogi modern, literasi digital, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, distribusi guru masih timpang antara sekolah di wilayah perkotaan dan perdesaan, yang berimplikasi pada kesenjangan mutu pendidikan.
    - Infrastruktur Pendidikan

      Sebagian bangunan sekolah masih membutuhkan rehabilitasi, sementara sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi relatif terbatas. Kondisi ini menghambat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan yang modern, inklusif, dan berbasis digital.
    - Tata Kelola dan Akuntabilitas

      Masih kurangnya tatakelola penyalahgunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan yang menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap manajemen layanan pendidikan.
2. Tantangan Eksternal
    - Kondisi Sosio-Ekonomi

      Tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap angka putus sekolah serta rendahnya angka partisipasi melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
    - Kompetisi dengan Sektor Swasta/Keagamaan

      Dominasi lembaga pendidikan berbasis keagamaan (MI dan MTs) maupun sekolah swasta menimbulkan tantangan bagi sekolah negeri

dalam menjaga daya saing dan relevansinya. Fenomena penurunan jumlah peserta didik hingga penutupan sekolah negeri menunjukkan urgensi perbaikan kualitas layanan pendidikan.

- Disrupsi Teknologi

  Pesatnya perkembangan teknologi menuntut adanya penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, serta peningkatan kompetensi guru agar lulusan memiliki relevansi dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan abad ke-21.

**b. Peluang**

1. Peluang Internal
   - Modal SDM Berkualitas

     Mayoritas tenaga pendidik telah berkualifikasi S1, sehingga menjadi modal dasar yang kuat untuk ditingkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.
   - Komitmen Politik Daerah

     Visi pembangunan daerah “Probolinggo SAE” dari Kepala Daerah terpilih memberikan dukungan politik yang kuat serta legitimasi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadikan sektor pendidikan dan kebudayaan sebagai prioritas pembangunan.
   - Kekayaan Budaya Lokal

     Tradisi masyarakat Tengger, kesenian daerah, serta situs cagar budaya merupakan aset penting yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal maupun dikembangkan sebagai daya tarik wisata edukasi. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas daerah, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.
2. Peluang Eksternal
   - Dukungan Pemerintah Pusat

     Ketersediaan berbagai program dan skema pendanaan dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, Dana BOS, serta program prioritas nasional, merupakan peluang strategis untuk mempercepat pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah.
   - Kolaborasi Multipihak

Terbuka luas kesempatan bekerja sama dengan sektor swasta, perguruan tinggi, serta komunitas dalam mendukung inovasi, seperti pengembangan Science Center, program literasi digital, maupun kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

## 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis gambaran kinerja pelayanan teridentifikasi sejumlah permasalahan fundamental yang menjadi hambatan utama dalam pencapaian kinerja optimal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Permasalahan ini disusun secara spesifik dan terukur sehingga dapat menjadi salah satu landasan dalam merumuskan isu strategis yang akan dijawab melalui kebijakan, program, dan kegiatan selama periode perencanaan 2025–2029.

Adapun permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan, sebagai berikut:

1. Kesenjangan Kualitas dan Akses Pendidikan.
    - Terdapat disparitas yang signifikan pada kualitas infrastruktur dan ketersediaan tenaga pendidik antara wilayah utara (relatif lebih maju) dan wilayah selatan (pegunungan dan terpencil).
2. Kesejahteraan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
    - Program pengembangan keprofesian berkelanjutan belum sepenuhnya berdampak signifikan. Meskipun mayoritas guru telah memenuhi kualifikasi S1, pemerataan kompetensi pedagogik, profesional, dan digital masih menjadi tantangan
    - Pola distribusi guru yang tidak seimbang, dengan penumpukan di wilayah perkotaan dan kekurangan di daerah terpencil, menghambat pemerataan kualitas pendidikan.
    - Kesejahteraan guru, terutama guru honorer dan di daerah khusus, masih perlu ditingkatkan untuk menjamin motivasi dan kinerja optimal.
3. Tingginya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
    - Faktor ekonomi keluarga merupakan penyebab utama anak tidak melanjutkan pendidikan, khususnya pada masa transisi dari SD ke SMP.
    - Persepsi masyarakat bahwa pendidikan formal tidak memberikan manfaat ekonomi langsung juga menjadi hambatan.

- Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan kesempatan bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.
- Kurangnya akses ke layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI) juga menjadi masalah, padahal layanan ini penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang optimal.
- Kondisi ini tidak hanya menghambat peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), tetapi juga memperlambat pencapaian target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Belum Terintegrasi.
    - Upaya pelestarian cagar budaya dan pembinaan komunitas seni masih berjalan secara parsial dan sektoral.
    - Kurangnya integrasi yang kuat antara sektor kebudayaan dengan kurikulum pendidikan, ekonomi kreatif, dan pariwisata daerah.
    - Potensi kebudayaan, seperti tradisi masyarakat Tengger, belum termanfaatkan secara optimal sebagai sumber belajar, identitas daerah, dan modal pembangunan yang berkelanjutan.
5. Tata Kelola Birokrasi.
    - Adanya temuan atau dugaan penyalahgunaan dana bantuan pemerintah (misalnya Dana BOS), mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas.
    - Permasalahan ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

## 2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Probolinggo. Proses ini didasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, capaian kinerja sebelumnya, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Isu-isu strategis yang dirumuskan mencerminkan tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian prioritas dalam periode perencanaan tahun 2025–2029. Rumusan ini menjadi landasan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo agar selaras dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029.

**a. Telaahan Visi, Misi, ;Tujuan dan Program RPJMD Kabupaten Probolinggo**

Permasalahan fundamental yang telah diidentifikasi sebelumnya memiliki keterkaitan erat dengan Visi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah–Religius, serta Eksis Berdaya Saing)."** Seluruh permasalahan yang muncul pada sektor pendidikan dan kebudayaan harus ditempatkan dalam kerangka pencapaian visi tersebut, sehingga strategi yang disusun mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh.

Secara lebih spesifik, keterkaitan permasalahan dengan misi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025–2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Misi 3 (SAE Pendidikan dan Kesehatan): Misi ini secara eksplisit menargetkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter**. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan sentral dalam mewujudkan misi ini melalui program-program peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan.
- **Misi 5 (SAE Sosial): Misi ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat adat, pelestarian nilai-nilai luhur, dan penguatan ketahanan sosial**. Hal ini sejalan dengan tugas **Dinas** Pendidikan dan Kebudayaan dalam memajukan kebudayaan dan kearifan lokal.

**b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus selaras dengan arahan pembangunan spasial dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

**1. Telaahan RTRW**

Rencana pembangunan sarana pendidikan baru, seperti sekolah atau pusat kegiatan belajar, serta revitalisasi cagar budaya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo. Lokasi

pembangunan harus disesuaikan dengan zona peruntukan dan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan, seperti kawasan agropolitan dan minapolitan, untuk mendukung pemerataan pembangunan dan efektivitas pelayanan.

**2. Telaahan KLHS**

Rencana Strategis ini mengintegrasikan rekomendasi dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029. Prinsip pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui beberapa cara:

a. Memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan dilakukan secara ramah lingkungan;
b. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam kurikulum muatan lokal untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu-isu seperti perubahan iklim dan pengelolaan sampah; dan
c. Memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang diusulkan selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB 4 yaitu Pendidikan Berkualitas.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi-misi kepala daerah, serta arahan RTRW dan KLHS, maka dirumuskan enam isu strategis yang akan menjadi fokus utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dalam periode 2025-2029:

1. **Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM):** Isu ini merupakan prioritas utama yang berfokus pada penyelesaian masalah kesenjangan akses, tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS), dan rendahnya partisipasi pendidikan. Keterlambatan dalam mencapai target RLS tidak hanya menghambat peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), tetapi juga secara langsung memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan harus diarahkan secara terpadu untuk memastikan setiap anak memiliki akses yang merata dan berkualitas ke pendidikan.
2. **Peningkatan Kualitas, Profesionalisme, dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan:** Isu ini menjawab tantangan terkait profesionalisme, kesejahteraan, dan pemerataan guru untuk menjamin kualitas pembelajaran yang merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas pendidikan tidak akan tercapai tanpa didukung oleh guru yang kompeten dan berdedikasi. Oleh

karena itu, kebijakan harus berfokus pada peningkatan kualifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan penempatan guru yang proporsional untuk mengisi kekurangan di daerah terpencil.

3. **Optimalisasi Implementasi PAUD Holistik Integratif: Isu ini adalah prioritas nasional yang menjadi fondasi utama untuk pengembangan anak usia dini**. Implementasi PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI) memastikan bahwa anak tidak hanya memperoleh layanan pendidikan, tetapi juga layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan yang terpadu. Hal ini penting untuk menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter sejak dini, yang pada akhirnya akan memperkuat SDM Kabupaten Probolinggo di masa depan.

4. **Penguatan Pendidikan Karakter dan Nilai-Nilai Religius Berbasis Kearifan Lokal:** Isu ini adalah penjabaran langsung dari visi "Amanah-Religius". Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem pendidikan tidak hanya mencetak insan yang cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia, memegang teguh nilai-nilai religius, dan bangga akan identitas budayanya. Penguatan ini dilakukan melalui integrasi nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah.
5. **Peningkatan Relevansi Pendidikan untuk Daya Saing Global dan Kebutuhan Industri:** Menghadapi era digital dan tuntutan pasar kerja, isu ini menekankan pentingnya adaptasi kurikulum yang relevan dan berorientasi masa depan. Fokusnya adalah pada pengembangan keterampilan praktis, literasi digital, dan literasi sains, untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga memiliki daya saing tinggi.
6. **Optimalisasi Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan sebagai Fondasi Identitas dan Ekonomi Kreatif:** Isu ini mengangkat peran strategis kebudayaan, dari yang semula dianggap sebagai pelengkap menjadi elemen inti dalam pembangunan karakter, sumber belajar, dan pendorong ekonomi kreatif daerah. Hal ini mencakup upaya perlindungan cagar budaya, pembinaan komunitas seni, serta pengembangan festival seni dan budaya yang berkelanjutan.
7. **Pemerataan Akses dan Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan yang Berkelanjutan:** Isu ini secara spesifik menyoroti kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, aman, dan merata. Tantangan geografis di Kabupaten Probolinggo memerlukan strategi pembangunan infrastruktur yang

adaptif terhadap bencana dan berkelanjutan, sehingga menjamin lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh siswa.

8. **Pengurangan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Melalui Kolaborasi Lintas Sektor:** Isu ini adalah respons langsung terhadap masalah sosial-ekonomi yang menjadi penyebab utama anak putus sekolah. Penanganannya tidak bisa hanya oleh Dinas Pendidikan, melainkan memerlukan kerja sama erat dengan dinas sosial, tenaga kerja, dan lembaga lainnya untuk menyediakan bantuan sosial, pelatihan keterampilan, serta dukungan ekonomi bagi keluarga rentan.
9. **Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi dalam Pendidikan dan Kebudayaan:** Isu ini menekankan pentingnya adopsi teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Hal ini mencakup pengembangan platform digital untuk pembelajaran, modernisasi sistem administrasi, serta mendorong penelitian yang relevan dengan kebutuhan daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas dan adaptasi terhadap perubahan.
10. **Penguatan Tata Kelola yang Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif: Isu ini merupakan respons langsung terhadap tantangan integritas dan kepercayaan publik**. Fokusnya adalah membangun sistem yang kokoh untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang bersih dari korupsi, efektif, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasannya. Hal ini sejalan dengan Misi 1 RPJMD untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang anti-korupsi.

Sebagai hasil dari analisis permasalahan dan kondisi eksternal, isu-isu strategis dirumuskan untuk menjadi fokus utama dalam periode perencanaan. Berikut adalah tabel yang menyajikan teknik penyimpulan isu-isu strategis tersebut.

Tabel 2.30

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | PERMASALAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| Tersedia guru PNS dan non PNS, potensi program PPG dan rekrutmen ASN PPPK daerah | Kompetensi, distribusi, dan kesejahteraan guru belum merata; kebutuhan guru di daerah terpencil masih kurang | Pemerataan akses layanan dasar pendidikan yang adil dan berkelanjutan untuk wilayah terpencil | SDG 4 (*Quality Education*) | RPJMN 2025–2029: Penguatan guru dan tenaga kependidikan | Tantangan internal; Relevan dengan Misi 3 RPJMD ("Membangun SDM Unggul") dan program prioritas GURU NYAMAN BEKERJA. | Peningkatan Kualitas, Profesionalisme, dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | PERMASALAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| Potensi CSR pendidikan, Dana BOSP | Disparitas kualitas infrastruktur dan layanan pendidikan; daya saing sekolah negeri menurun | Kesenjangan akses infrastruktur pendidikan yang ramah lingkungan dan inklusif | SDG 4 (*Quality Education*), SDG 9 (*Infrastructure*) | RPJMN: Pemerataan akses pendidikan | Tantangan internal dan eksternal; Relevan dengan Misi 3 RPJMD ("Peningkatan Akses & Kualitas") dan isu makro RPJMD tentang kesenjangan wilayah. | Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan yang Inklusif dan Berdaya Saing. |
| Program wajib belajar 12 tahun, PKBM, KIP dan dukungan APBD | Persepsi bahwa pendidikan formal tidak memberi manfaat ekonomi langsung; tingginya ATS | Keterkaitan akses pendidikan dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan sosial | SDG 1 (*No Poverty*), SDG 4 (*Quality Education*) | RPJMN: Penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan | Tantangan sosio-ekonomi; Relevan dengan Misi 3 RPJMD dan isu makro RPJMD tentang penanggulangan kemiskinan. | Pengurangan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Melalui Kolaborasi Lintas Sektor. |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | PERMASALAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| Potensi kearifan lokal, lembaga adat, sanggar budaya, kurikulum muatan lokal | Lulusan perlu penguatan akhlak mulia dan pemahaman budaya local | Pelestarian budaya lokal dan kearifan tradisional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan | SDG 4 (*Education for Sustainable Development*), SDG 11 (*Sustainable Communities*) | RPJMN: Penguatan Profil Pelajar Pancasila | Peluang (Kekayaan Budaya); Relevan dengan visi "Amanah-Religius" dan Misi 5 RPJMD ("Pemberdayaan Masyarakat Adat"). | Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Amanah-Religius dan Kearifan Lokal. |
| Tersedia jaringan TIK daerah, literasi digital guru dan siswa | Pembelajaran dan tata kelola belum optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi | Penguatan kapasitas digital dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pembelajaran | SDG 9 (*Innovation & Infrastructure*), SDG 4 | RPJMN: Digitalisasi sektor pendidikan | Tantangan & Peluang (Disrupsi Teknologi); Relevan dengan Misi 1 RPJMD ("Inovatif") dan program prioritas MATA PRABULINGGIH. | Akselerasi Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pembelajaran dan Tata Kelola. |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | PERMASALAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| Kekayaan seni, adat, tradisi lokal, cagar budaya, sanggar seni | Potensi budaya belum terintegrasi sebagai sumber belajar dan ekonomi kreatif | Pemanfaatan sumber daya budaya lokal sebagai modal pembangunan berkelanjutan | SDG 4, SDG 11 | RPJMN: Ekonomi kreatif & budaya | Peluang (Kekayaan Budaya); Relevan dengan Misi 5 RPJMD dan program prioritas SAE SENI BUDAYA. | Optimalisasi Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan sebagai Fondasi Identitas dan Ekonomi Kreatif. |
| PAUD, Pos PAUD, Bunda PAUD, program Holistik Integratif | Belum optimalnya layanan pendidikan anak usia dini yang terintegrasi | Penguatan layanan PAUD sebagai investasi sosial jangka Panjang | SDG 4.2 (*Early Childhood Education*) | RPJMN: PAUD HI | Kebutuhan internal (permasalahan PAUD-HI); Prioritas nasional. | Optimalisasi Implementasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif. |
| Dana BOSP, CSR | Sarana dan prasarana pendidikan belum merata, belum ramah lingkungan, dan rentan terhadap bencana | Pengembangan infrastruktur pendidikan berketahanan iklim dan bencana | SDG 9 & 13 (*Climate Action*) | RPJMN: Infrastruktur pendidikan dan mitigasi bencana | Tantangan internal (daya dukung lingkungan); Relevan dengan Misi 4 RPJMD ("Infrastruktur") dan telaahan KLHS. | Pemerataan Akses dan Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan yang Berkelanjutan. |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | PERMASALAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| Program Vokasi Pendidikan Kesetaran dan SMP unggulan, kemitraan industri lokal | Kurangnya adaptasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan industri dan meningkatkan daya saing global | Pengembangan SDM tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika ekonomi | SDG 4, SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) | RPJMN: Revitalisasi SMK dan keterampilan abad 21 | Tantangan eksternal (relevansi pendidikan); Relevan dengan Misi 2 RPJMD ("Ketahanan Ekonomi") dan RPJMN. | Peningkatan Relevansi Pendidikan untuk Daya Saing Global dan Kebutuhan Industri. |
| SDM ASN pendidikan | Tata kelola dan birokrasi di sekolah belum optimal | Penguatan tata kelola sektor pendidikan yang transparan dan berkelanjutan | SDG 16 (*Good Governance*) | RPJMN: Reformasi birokrasi | Tantangan internal (integritas birokrasi); Relevan dengan Misi 1 RPJMD ("Anti Korupsi") dan program prioritas PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI. | Penguatan Tata Kelola yang Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif. |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk menjawab isu-isu strategis yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Tujuan merupakan pernyataan kualitatif tentang kondisi ideal yang ingin diwujudkan, sedangkan sasaran adalah penjabaran tujuan yang lebih spesifik dan terukur, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang jelas.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahap krusial dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Pada tahap ini, visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan diterjemahkan menjadi serangkaian tujuan strategis yang lebih konkret dan sasaran-sasaran yang terukur.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengemban amanat Misi ke-3, yaitu SAE Pendidikan dan Kesehatan, dengan fokus pada pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing, serta Misi ke-5, yaitu SAE Sosial, yang menekankan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya. Komitmen ini dijabarkan secara konkret dalam bentuk tujuan dan sasaran perangkat daerah, dengan indikator kinerja yang terukur. Tujuan Renstra Dinas Pendidkan dan Kebudayaan adalah **Meratanya Akses Pendidikan dan Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal** dengan indikator bidang Pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan di bidang kebudayaan dititikberatkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Sasaran diarahkan pada peningkatan partisipasi pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang tercermin melalui capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun dan 7–15 tahun, serta penurunan persentase Anak Tidak Sekolah (ATS). Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan pendidikan yang inklusif, kolaboratif, dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan rentan secara sosial ekonomi.

Dalam bidang kebudayaan, sasaran peningkatan pemajuan kebudayaan lokal difokuskan pada pelestarian obyek kebudayaan dan peningkatan nilai pemantauan serta evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Hal ini

merupakan wujud nyata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menempatkan kebudayaan sebagai pilar pembangunan karakter bangsa dan penggerak ekonomi kreatif daerah.

Peningkatan akuntabilitas tata kelola perangkat daerah menjadi sasaran strategis yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pelaksanaan Renstra. Melalui peningkatan nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada hasil (result-oriented government), sejalan dengan prinsip good governance dan misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam membangun birokrasi yang SAE — Sejahtera, Amanah–Religius, dan Eksis Berdaya Saing

Berikut rumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:.

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Probolinggo

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | | | | | | | | | | | |
| • **Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal**<br>• **Meratanya Akses Pendidikan** | Meratanya Akses Pendidikan dan Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal | | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 12,64 | 12,88 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | |
| | | | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun)) | 6,31 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8 | |
| | | | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%)) | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi | Angka Partisipasi | 90,56 | 93,12 | 95,97 | 98,21 | 100 | 100 | 100 | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Sekolah (APS) 5-6 Tahun (%)<br><br>*Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** | | | | | | | | |
| | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun (%)<br><br>*Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** | 97,33 | 97,55 | 97,77 | 97,98 | 98,20 | 98,42 | 98,63 | |
| | | | Prosentase Anak Tidak Sekolah (ATS) (%) | 3,9 | 3,59 | 3,43 | 3,27 | 3,11 | 2,96 | 2,8 | |
| | | Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal | Persentase Obyek Kebudayaan yang | 59,38 | 59,5 | 60 | 61 | 62 | 63,5 | 65 | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | dilestarikan (%) | | | | | | | | |
| | | | Nilai Pemantauan dan Evaluasi PPKD (Nilai) | 0 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | -1,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

Tabel 3.2
Definisi Operasional
Dinas pendidikan dan kebudayaan

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan<br>dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. | HLS = Σ (Pi * Ei)<br>HLS: adalah Harapan Lama Sekolah.<br>Pi: adalah proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang bersekolah.<br>Ei: adalah umur penduduk pada kelompok tersebut.<br>Σ: adalah notasi sigma yang berarti penjumlahan dari semua kelompok umur, dimulai dari umur 7 tahun ke atas. | Tujuan PD |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **2** | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun) | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata- rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan Tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:<br>- Tidak punya ijazah = 0 tahun;<br>- SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun;<br>- SMA = 12 tahun;<br>- D1/D2 = 14 tahun;<br>- D3 = 15 tahun;<br>- D4 = 16 tahun;<br>- S1 = 17 tahun;<br>- S2 = 19 tahun;<br>- S3 = 22 tahun. | RLS = (1/n) * Σ xi<br>RLS: adalah Rata-rata Lama Sekolah.<br>n: adalah jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas.<br>xi: adalah lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 15 tahun ke atas | Tujuan PD |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **3** | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%) | Instrumen untuk mengukur capaian kinerja Pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan Gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan<br>memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:<br>1) dimensi ekonomi budaya;<br>2) dimensi pendidikan;<br>3) dimensi ketahanan sosial budaya;<br>4) dimensi warisan budaya;<br>5) dimensi ekspresi budaya;<br>6) dimensi budaya literasi; dan<br>7) dimensi kesetaraan gender | $IPK = \sum_{j=1}^{7}(W_j \times indeks\ D_j)$<br>Keterangan:<br>$IPK$ = Indeks Pembangunan Kebudayaan<br>$W_j$ = Bobot dimensi ke-$j$<br>$D_j$ = Dimensi ke-$j$<br><br>Rumus menghitung indeks dimensi ($D_j$):<br>$Indeks\ D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j}\right) \times 100$<br>Keterangan:<br>$D_j$ = Dimensi ke-$j$<br>$SX_{ji}$ = Nilai indikator $i$ pada dimensi ke- $j$ yang sudah dinormalisasi<br>$n_j$ = Jumlah indikator dimensi ke-$j$ | Tujuan PD |
| **4** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (%)<br>*Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** | proporsi penduduk usia sekolah 5-6 tahun yang mengikuti pendidikan, yang dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada usia 5-6 tahun jenjang tersebut dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai | APS 5-6 Tahun = ((Jumlah penduduk usia 5–6 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 5–6 tahun) x 100% | Sasaran PD |
| **5** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun (%)<br>*Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** | proporsi penduduk usia sekolah 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan, yang dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada usia 7-15 tahun jenjang tersebut dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai | APS 7-15 Tahun = (Jumlah penduduk usia 7–15 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 13–15 tahun) xi 100% | Sasaran PD |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **6** | Prosentase Anak Tidak Sekolah (ATS) (%) | proporsi anak-anak dalam kelompok usia 7-24 Tahun yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah | ATS = (Jumlah penduduk usia 7–24 tahun yang tidak sekolah / Jumlah penduduk usia75–24 tahun) x 100% | Sasaran PD |
| **7** | Prosentase Obyek Kebudayaan yang dilestarikan | Persentase objek kebudayaan (baik benda maupun tak benda) yang mendapatkan perlakuan pelestarian melalui kegiatan pendataan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan oleh pemerintah daerah. | = (Jumlah obyek Kebudayaan yang dilestarikan / Jumlah total obyek kebudayaan yang terdata) x 100% | Sasaran PD |
| **8** | Nilai Pemantauan dan Evaluasi PPKD | Nilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (PPKD) yang dilakukan oleh instansi pembina atau evaluator resmi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi) , berdasarkan indikator kinerja dan capaian output/outcome. | Penilaian berdasarkan skor evaluasi yang diberikan oleh tim evaluator terhadap komponen: perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja, dan pelaporan program/kegiatan PPKD. Nilai Akhir = (Jumlah Skor yang diperoleh / Skor Maksimum) x 100% | Sasaran PD |
| **9** | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 5-6 Tahun | proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD yang sesuai dengan kelompok umur tersebut (5-6 Tahun) | APM PAUD = (Jumlah siswa usia sekolah pada jenjang PAUD usia 5-6 tahun / Jumlah penduduk usia sekolah 5-6 tahun pada jenjang yang sama) x 100% | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **10** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun<br>*Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar** | proporsi penduduk usia sekolah 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan, yang dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada usia 7-12 tahun jenjang tersebut dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai | APS 7-12 Tahun = ((Jumlah penduduk usia 7–12 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 7–12 tahun) x 100% | |
| **11** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun<br>*Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama** | proporsi penduduk usia sekolah 13-15 tahun yang mengikuti pendidikan, yang dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada usia 13-15 tahun jenjang tersebut dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai | APS 13-15 Tahun = (Jumlah penduduk usia 13–15 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 13–15 tahun) xi 100% | |
| **12** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan<br>*Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)** | proporsi penduduk usia sekolah 7-18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan, yang dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada usia 7-18 tahun jenjang tersebut dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai | APS 7-18 Tahun Kesetraaan = (Jumlah penduduk usia 7–18 tahun yang bersekolah di kesetaraan / Jumlah penduduk usia 7–18 tahun) xi 100% | |
| **13** | Prosentase Penduduk usia 19-59 yang mengikuti PNF/Kesetaraan | Jumlah warga negara usia 19-59 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | APS 19-59 Tahun Kesetraaan = (Jumlah penduduk usia 19–59 tahun yang bersekolah di kesetaraan / Jumlah penduduk usia 19–59 tahun) xi 100% | |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **14** | proporsi jumlah satuan SD yang mendapatkan minimal akreditasi B | Persentase satuan SD yang telah memperoleh nilai akreditasi minimal B dari BAN S/M | = (Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi Minimal B / Jumlah Satuan Pendidikan SD keseluruhan) x 100% | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |
| **15** | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | proporsi seluruh siswa pada suatu jenjang pendidikan Sekolah Dasar, tanpa memandang usia, terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang seharusnya mengikuti jenjang pendidikan tersebut | APK SD = (Jumlah Siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar / Jumlah Penduduk Usia Sekolah 7-12 pada Jenjang yang Sama) x 100% | |
| **16** | Kemampuan literasi SD *Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional** | Tingkat kemampuan siswa SD dalam membaca dan memahami teks sesuai standar nasional. | Nilai rata-rata literasi siswa SD berdasarkan asesmen nasional atau rapor pendidikan. | |
| **17** | Kemampuan numerasi SD *Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional** | Tingkat kemampuan siswa SD dalam berhitung dan berpikir logis matematis. | Nilai rata-rata numerasi siswa SD berdasarkan asesmen nasional atau rapor pendidikan. | |
| **18** | Iklim keamanan SD | Indeks persepsi siswa terhadap keamanan di sekolah (bebas dari perundungan, kekerasan). | Skor indeks iklim keamanan dari hasil survei lingkungan belajar (dari rapor pendidikan). | |
| **19** | Iklim kebhinekaan SD | Indeks persepsi atas keberagaman dan toleransi di lingkungan sekolah dasar. | Skor indeks kebhinekaan dari hasil survei lingkungan belajar. (dari rapor pendidikan) | |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **20** | Iklim inklusivitas SD | Indeks yang menggambarkan keterlibatan dan penerimaan terhadap seluruh siswa tanpa diskriminasi. | Skor dari survei iklim inklusivitas (rapor pendidikan). | |
| **21** | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |
| **22** | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |
| **23** | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah |
| **24** | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah |
| **25** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| **26** | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |
| **27** | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **28** | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah |
| **29** | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah |
| **30** | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah |
| **31** | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah |
| **32** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |
| **33** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **34** | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |
| **35** | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| **36** | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik |
| **37** | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| **38** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| **39** | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah |
| **40** | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **41** | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik |
| **42** | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |
| **43** | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik |
| **44** | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |
| **45** | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik |
| **46** | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **47** | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |
| **48** | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |
| **49** | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan |
| **50** | proporsi jumlah satuan SMP yang mendapatkan minimal akreditasi B | Persentase satuan SMP yang telah memperoleh nilai akreditasi minimal B dari BAN S/M | = (Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi Minimal B / Jumlah Satuan Pendidikan SMP keseluruhan) x 100% | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| **51** | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | proporsi seluruh siswa pada suatu jenjang pendidikan Sekolah Menengah pertama, tanpa memandang usia, terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang seharusnya mengikuti jenjang pendidikan tersebut | APK SMP = (Jumlah Siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / Jumlah Penduduk Usia Sekolah 13-15 pada Jenjang yang Sama) x 100% | |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **52** | Kemampuan literasi SMP<br><br>*Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional** | Tingkat kemampuan siswa SMP dalam membaca dan memahami teks sesuai standar nasional. | Nilai rata-rata literasi siswa SMP berdasarkan asesmen nasional atau rapor pendidikan. | |
| **53** | Kemampuan numerasi SMP<br><br>*Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional** | Tingkat kemampuan siswa SMP dalam berhitung dan berpikir logis matematis. | Nilai rata-rata numerasi siswa SMP berdasarkan asesmen nasional atau rapor pendidikan. | |
| **54** | Iklim keamanan SMP | Indeks persepsi siswa terhadap keamanan di sekolah (bebas dari perundungan, kekerasan). | Skor indeks iklim keamanan dari hasil survei lingkungan belajar (dari rapor pendidikan). | |
| **55** | Iklim kebhinekaan SMP | Indeks persepsi atas keberagaman dan toleransi di lingkungan sekolah dasar. | Skor indeks kebhinekaan dari hasil survei lingkungan belajar. (dari rapor pendidikan) | |
| **56** | Iklim inklusivitas SMP | Indeks yang menggambarkan keterlibatan dan penerimaan terhadap seluruh siswa tanpa diskriminasi. | Skor dari survei iklim inklusivitas (rapor pendidikan). | |
| **57** | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |
| **58** | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **59** | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah |
| **60** | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah |
| **61** | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium |
| **62** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| **63** | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah |
| **64** | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah |
| **65** | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah |
| **66** | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **67** | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula |
| **68** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| **69** | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah |
| **70** | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah |
| **71** | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| **72** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **73** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| **74** | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |
| **75** | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| **76** | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| **77** | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik |
| **78** | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **79** | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik |
| **80** | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |
| **81** | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |
| **82** | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik |
| **83** | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa |
| **84** | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **85** | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |
| **86** | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan |
| **87** | proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | Persentase satuan PAUD yang telah memperoleh nilai akreditasi minimal B dari BAN PAUD dan PNF. | = (Satuan PAUD Formal yang terakreditasi Minimal B / Jumlah Satuan PAUD Formal keseluruhan) x 100% | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| **88** | Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV) | Persentase guru PAUD yang memiliki ijazah pendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) | = (Jumlah guru PAUD dengan kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Total Guru PAUD) x 100% | |
| **89** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |
| **90** | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD |
| **91** | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **92** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD |
| **93** | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD |
| **94** | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD |
| **95** | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD |
| **96** | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **97** | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan |
| **98** | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |
| **99** | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |
| **100** | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik |
| **101** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |
| **102** | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD |
| **103** | Jumlah Ruang Kelas yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **104** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD |
| **105** | proporsi jumlah satuan PNF yang mendapatkan minimal akreditasi B | Persentase satuan PNF yang telah memperoleh nilai akreditasi minimal B | = (Satuan Pendidikan PNF yang terakreditasi Minimal B / Jumlah Satuan Pendidikan PNF keseluruhan) x 100% | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| **106** | Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Jumlah peserta didik aktif di lembaga nonformal/kesetaraan dalam periode tertentu. | Jumlah peserta dari data dapodik/simdiklat/kesetaraan. | |
| **107** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| **108** | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
| **109** | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **110** | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| **111** | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan |
| **112** | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |
| **113** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| **114** | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |
| **115** | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **116** | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik |
| **117** | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal |
| **118** | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
| **119** | Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal | Proporsi satuan pendidikan yang menyusun dan mengimplementasikan kurikulum muatan lokal berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan peserta didik | = (Jumlah Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, PNF yang mengembangkan kurikulum muatan lokal / jumlah total satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, PNF ) x 100% | 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM |
| **120** | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan kurikulum muatan lokal | Jumlah SD/SMP yang menerapkan kurikulum muatan lokal di pembelajarannya | Jumlah SD/SMP yang menerapkan kurikulum muatan lokal di pembelajarannya | 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar |
| **121** | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar |
| **122** | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **123** | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar |
| **124** | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun | 1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar |
| **125** | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar |
| **126** | Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang melaksanakan kurikulum muatan lokal | Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang melaksanakan kurikulum muatan lokal | Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang melaksanakan kurikulum muatan lokal | 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |
| **127** | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |
| **128** | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **129** | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun | 1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |
| **130** | JumlahKompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | JumlahKompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | JumlahKompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |
| **131** | Persentase Satuan Pendidikan yang terpenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik | Proporsi satuan pendidikan yang telah memiliki jumlah dan jenis pendidik serta tenaga kependidikan sesuai kebutuhan minimal berdasarkan ketentuan yang berlaku | = (Jumlah satuan pendidikan yang kebutuhan PTK-nya terpenuhi / Jumlah total satuan pendidikan) x 100% | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
| **132** | Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik | Proporsi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik | = (Jumlah Guru bersertifikat pendidikn / Jumlah total guru) x 100% | |
| **133** | Indeks Distribusi Guru | Ukuran yang menggambarkan tingkat keadilan distribusi guru antarsatuan pendidikan, biasanya dinyatakan dalam skala 0–1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan distribusi yang semakin merata. | (Formula lengkap dihitung sistem oleh Kemendikbudristek melalui Rapor Pendidikan dan tidak terbuka detail teknisnya. Namun hasilnya dapat diakses melalui dashboard rapor pendidikan masing-masing daerah.) | |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **134** | Proporsi guru dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV) | Persentase guru seluruh jenjang yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1 atau D-IV. | = (Jumlah guru dengan kualifikasi S1/DIV / Jumlah total guru) x 100% | 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| **135** | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| **136** | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| **137** | Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memiliki perizinan yang berlaku | Proporsi satuan pendidikan dasar (SD/SMP) yang telah memiliki izin operasional yang sah dan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | = (Jumlah satuan pendidikan dasar yang memilik izin berlaku / Jumlah Total Satuan Pendidikan Dasar) x 100% | 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **138** | Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan yang memiliki perizinan yang berlaku | Proporsi satuan pendidikan PAUD PNF yang telah memiliki izin operasional yang sah dan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | = (Jumlah satuan pendidikan PAUD PNF yang memilik izin berlaku / Jumlah Total Satuan Pendidikan PAUD PNF) x 100% | |
| **139** | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui | Proporsi permohonan/perpanjangan izin satuan pendidikan (baru atau pembaruan) yang berhasil diterbitkan dalam suatu periode. | = (Jumlah usulan izin yang diterbitkan atau diperbarui/ Jumlah Total Usulan izin yang masuk) x 100% | |
| **140** | Jumlah Perizinan Satuan Pendidikan Dasar yang memiliki perizinan yang berlaku | Jumlah SD dan SMP yang memiliki izin operasional aktif dan sah. | Jumlah SD dan SMP yang memiliki izin operasional aktif dan sah. | 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |
| **141** | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |
| **142** | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **143** | Jumlah Perizinan Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang berlaku | Jumlah Perizinan Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang berlaku | Jumlah Perizinan Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang berlaku | 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |
| **144** | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |
| **145** | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |
| **146** | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |
| **147** | Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra | Proporsi satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan pengembangan, pembinaan, atau pelindungan bahasa dan sastra daerah di lingkungan satuan Pendidikan | Jumlah Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dibagi jumlah satuan pendidikan keseluruhan dikali 100% | 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **148** | Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah | Jumlah sekolah/lembaga yang memperoleh intervensi dalam bentuk pelatihan atau program bahasa & sastra daerah. | Jumlah sekolah/lembaga yang memperoleh intervensi dalam bentuk pelatihan atau program bahasa & sastra daerah. | 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| **149** | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi | 1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota |
| **150** | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun | 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota |
| **151** | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan | 1.01.06.2.01.0008 Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah |
| **152** | Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi | Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi | Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi | 1.01.06.2.01.0011 Fasilitasi media publik berbahasa daerah |
| **153** | Persentase obyek budaya yang dikembangkan | Persentase objek budaya yang mendapatkan intervensi pengembangan, seperti revitalisasi, dokumentasi, atau penyelenggaraan event budaya. | = (Jumlah obyek budaya yang dikembangkan / jumlah total obyek budaya yang terdata) x 100% | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **154** | Jumlah objek kebudayaan yang dilestarikan | Jumlah objek kebudayaan yang dilestarikan | Jumlah objek kebudayaan yang dilestarikan | 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| **155** | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan |
| **156** | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan |
| **157** | Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan | Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan | Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan | 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| **158** | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya |
| **159** | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **160** | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan | Persentase jenis kesenian tradisional lokal yang mendapatkan dukungan pelestarian (pembinaan, pelatihan, pementasan, dll.) dari pemerintah daerah. | = (Jumlah kesenian tardisional yang dilestarikan dan dikembangkan / Jumlah obyek kesenian tradisional) x 100% | 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL |
| **161** | Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina | Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina | Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina | 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| **162** | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional |
| **163** | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional |
| **164** | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | Persentase jumlah objek budaya yang telah ditetapkan secara resmi sebagai Cagar Budaya dan/atau Warisan Budaya Tak Benda melalui SK Kepala Daerah/Bupati. | = (Jumlah Cagar Budaya dan WBTB yang ditetapkan / Jumlah total Cagar Budaya dan WBTP yang didata) x 100% | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **165** | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | Persentase warisan budaya (baik benda maupun tak benda) yang mendapat perlakuan pelestarian oleh pemerintah daerah melalui program kegiatan pembinaan atau revitalisasi. | = (jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan / Jumlah total warisan Budaya) x 100% | |
| **166** | jumlah cagar budaya yang ditetapkan | jumlah cagar budaya yang ditetapkan | jumlah cagar budaya yang ditetapkan | 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota |
| **167** | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya |
| **168** | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya |
| **169** | Jumlah cagar budaya yang dikelola | Jumlah cagar budaya yang dikelola | Jumlah cagar budaya yang dikelola | 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota |
| **170** | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya |
| **171** | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya |
| **172** | Prosentase Koleksi Museum yang dihimpun | Persentase peningkatan jumlah koleksi museum yang berhasil dihimpun dalam periode tertentu dari target atau kebutuhan koleksi. | = (Jumlah koleksi museum yang dihimpun tahun ini / Target koleksi museum yang direncanakan) | 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN |
| **173** | Jumlah Koleksi Museum yang Dihimpun | Jumlah Koleksi Museum yang Dihimpun | Jumlah Koleksi Museum yang Dihimpun | 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **174** | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu |
| **175** | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | 2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman |
| **176** | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum |
| **177** | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum |
| **178** | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi | 2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum |
| **179** | Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola | Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola | Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola | 2.22.06.2.01.0013 Pengelolaan Koleksi Museum |
| **180** | Jumlah Layanan Operasional Museum | Jumlah Layanan Operasional Museum | Jumlah Layanan Operasional Museum | 2.22.06.2.01.0014 Pengelolaan Operasional Museum |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **181** | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum | 2.22.06.2.01.0015 Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum |
| **182** | Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah) adalah skor yang diberikan oleh Inspektorat terhadap kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah, berdasarkan hasil evaluasi tahunan yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. | Nilai LHE AKIP PD = Nilai akhir hasil evaluasi dari Inspektorat (Skala 0–100 atau predikat A s.d. D sesuai pedoman evaluasi SAKIP) | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| **183** | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Telah Disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Telah Disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Telah Disusun | X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| **184** | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **185** | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| **186** | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| **187** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| **188** | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| **189** | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| **190** | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **191** | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| **192** | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | X.XX.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| **193** | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| **194** | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | X.XX.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
| **195** | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| **196** | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| **197** | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **198** | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| **199** | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| **200** | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| **201** | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| **202** | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| **203** | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| **204** | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | X.XX.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud |
| **205** | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | X.XX.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **206** | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| **207** | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel |
| **208** | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Tersedia | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Tersedia | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Tersedia | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| **209** | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| **210** | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| **211** | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara | X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| **212** | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **213** | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | X.XX.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud |
| **214** | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

### a. Penentuan Strategi

Untuk mencapai setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengimplementasikan serangkaian strategi dan arah kebijakan yang saling terkait. Strategi merupakan pendekatan umum yang dipilih, sedangkan arah kebijakan adalah pedoman yang lebih spesifik untuk perumusan program dan kegiatan.

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| No | Operasionalisasi NSPK | Strategi | Arah kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Pendidikan. | Pemerataan Kualitas dan Pemenuhan Akses Penunjang Layanan Pendidikan | Misi 3: Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kebutuhan Dasar lainnya yang Terjangkau. | **Peningkatan kualitas dan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dasar yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing.** | Dilakukan melalui program Rehab 1.000 Sekolah, 10.000 Beasiswa Sampai Sarjana, dan GURU NYAMAN BEKERJA. |
| **2** | Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. | Pemerataan Kualitas dan Pemenuhan Akses Penunjang Layanan Pendidikan | Misi 3: Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan. | **Peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata.** | Mengacu pada program GURU NYAMAN BEKERJA dan pelatihan guru berbasis PMM. |
| **3** | Perlindungan dan pelestarian cagar budaya serta pemajuan kebudayaan. | Peningkatan partisipasi pemuda dalam Upaya melestarikan | Misi 5: Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, | **Pelestarian dan pemajuan kebudayaan sebagai fondasi identitas daerah** | Terintegrasi dengan inisiatif GUS WARIS dan promosi |

| No | Operasionalisasi NSPK | Strategi | Arah kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | budaya melalui keikutsertaan dalam event-event budaya yang diselenggarakan dan meningkatkan pembentukan sanggar budaya | masyarakat rentan dan disabilitas. | **dan pendukung ekonomi kreatif.** | pariwisata budaya. |
| **4** | Pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. | Meningkatkan Kualitas Manajemen Tata Kelola, Keuangan dan Kepegawaian yang berorientasi kinerja | Misi 1: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif. | **Peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola birokrasi yang didukung oleh teknologi informasi.** | Dilakukan melalui digitalisasi layanan, pengawasan internal, dan inisiatif PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI. |
| **5** | Pengembangan pendidikan anak usia dini yang holistik integratif. | Pemerataan Kualitas dan Pemenuhan Akses Penunjang Layanan Pendidikan | Misi 3: Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing. | **Pengembangan PAUD Holistik Integratif untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal dan merata.** | Mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi, sejalan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). |

**b. Penahapan Pembangunan**

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, implementasi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 akan dilaksanakan melalui pendekatan bertahap. Setiap tahapan tahunan dirancang dengan fokus prioritas yang spesifik, yang dibangun secara logis di atas capaian tahun sebelumnya.

Pendekatan ini memungkinkan alokasi sumber daya yang terarah, adaptasi terhadap dinamika yang terjadi, serta evaluasi yang berkesinambungan. Kerangka kerja ini dimulai dari penguatan fondasi sistem pendidikan dan tata kelola, dilanjutkan dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan SDM, akselerasi melalui program-program inovatif, perluasan jangkauan untuk memastikan pemerataan, hingga pemantapan sistem untuk menjamin keberlanjutan program di akhir periode.

Setiap fokus prioritas ini secara langsung dikaitkan dengan target-target utama yang terukur, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pada setiap fase. Rincian tahapan implementasi Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Penahapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Tahapan (Tahun) | Fokus Prioritas | Target Utama |
|---|---|---|
| **Tahun 1 (2025)** | Penguatan fondasi: Pemetaan kebutuhan guru, rehabilitasi sekolah prioritas, dan penguatan sistem tata kelola. | • RLS mencapai 6,7 tahun.<br>• Nilai SAKIP 81,32.<br>• |
| **Tahun 2 (2026)** | Peningkatan kualitas: Implementasi masif pelatihan guru berbasis PMM dan digitalisasi sekolah tahap awal dan pelestarian Obyek Kebudayaa | • % Guru PAUD Formal S1/D4 naik<br>• % Sekolah terakreditasi B naik.<br>• Persentase Obyek Kebudayaan yang dilestarikan naik |
| **Tahun 3 (2027)** | Akselerasi dan inovasi: Peluncuran program unggulan (Sekolah Percontohan melalui *International Class Program, Science Center*) dan penguatan kurikulum muatan lokal berbasis budaya. | • HLS mencapai 13,2 tahun.<br>• IPK mencapai 60,5. |

| | | |
|---|---|---|
| **Tahun 4 (2028)** | Perluasan dan pemerataan: Fokus pada sekolah di daerah 3T dan optimalisasi layanan pendidikan inklusif. | • Penurunan ATS signifikan.<br>• Sebaran guru berkualitas lebih merata. |
| **Tahun 5 (2029)** | Pemantapan dan keberlanjutan: Evaluasi menyeluruh, penguatan best practices, dan memastikan keberlanjutan program. | • Seluruh target Renstra tercapai. |

### c. Lokus Renstra

Lokus Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 diarahkan secara bertahap sesuai dengan fokus prioritas tahunan. Setiap lokus menjadi titik konsentrasi pelaksanaan program agar sasaran strategis dapat dicapai secara terukur dan berkelanjutan.

Tabel 3.5

Tahapan Pelaksanaan Renstra

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029

| Tahapan | Tahapan Renstra | Target Utama | Fokus Prioritas | Lokus Renstra |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Tahun 2025 – Penguatan Fondasi | Penataan dan penguatan dasar tata kelola pendidikan serta rehabilitasi sarana prasarana prioritas. | 1. Rehabilitasi sekolah dasar dan menengah.<br>2. Penguatan tata kelola dana BOS.<br>3. Pemetaan kebutuhan guru pada PAUD, SD, dan SMP. | Satuan pendidikan dasar dan menengah yang membutuhkan rehabilitasi prioritas, serta sekolah penerima BOS di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. |
| **2** | Tahun 2026 – Peningkatan Kualitas | Peningkatan kompetensi pendidik dan mutu layanan pendidikan berbasis digital dan pelestarian | 1. Pelatihan guru PAUD, SD, dan SMP berbasis PMM.<br>2. Implementasi digitalisasi sekolah. | Sekolah percontohan di wilayah perkotaan dan pusat kecamatan, serta sekolah dengan akreditasi C. |

| Tahapan | Tahapan Renstra | Target Utama | Fokus Prioritas | Lokus Renstra |
|---|---|---|---|---|
| | | Obyek Kebudayaa | 3. Peningkatan akreditasi sekolah dari C ke B.<br>4. Peningkatan pelestarian Obyek Kebudayaa | |
| **3** | Tahun 2027 – Akselerasi dan Inovasi | Penguatan inovasi pendidikan dan pengembangan sekolah unggulan berbasis riset dan budaya lokal. | 1. Pengembangan Sekolah Percontohan (International Class Program dan Science Center).<br>2. Penguatan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal dan budaya daerah. | Sekolah unggulan dan sekolah berbasis budaya di kecamatan dengan potensi seni dan tradisi yang kuat. |
| **4** | Tahun 2028 – Perluasan dan Pemerataan | Pemerataan akses pendidikan berkualitas dan layanan pendidikan inklusif. | 1. Pengembangan akses pendidikan di wilayah 3T.<br>2. Penguatan layanan pendidikan inklusif di sekolah reguler dan SLB. | Wilayah 3T serta sekolah penyelenggara pendidikan khusus dan sekolah reguler penerima ABK. |
| **5** | Tahun 2029 – Pemantapan dan Keberlanjutan | Konsolidasi hasil capaian program dan replikasi praktik terbaik untuk keberlanjutan pembangunan pendidikan. | 3. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh satuan pendidikan.<br>4. Replikasi program best practices yang terbukti efektif. | Seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Probolinggo. |

1) Tahun 2025 – Penguatan Fondasi

- Lokus utama pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang membutuhkan rehabilitasi prioritas, serta sekolah penerima dana BOS sebagai objek penguatan tata kelola.

- Pemetaan kebutuhan guru difokuskan pada satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.

2) Tahun 2026 – Peningkatan Kualitas
   - Lokus implementasi berada pada guru PAUD, SD, dan SMP yang menjadi sasaran pelatihan berbasis PMM.
   - Digitalisasi sekolah dimulai pada sekolah percontohan di wilayah perkotaan dan pusat kecamatan sebagai tahap awal.
   - Lokus tambahan pada sekolah-sekolah akreditasi C yang ditargetkan naik ke akreditasi B.
3) Tahun 2027 – Akselerasi dan Inovasi
   - Lokus pengembangan Sekolah Percontohan (International Class Program dan Science Center) di beberapa sekolah unggulan.
   - Lokus kurikulum muatan lokal diarahkan pada sekolah berbasis budaya dan kearifan lokal di kecamatan yang memiliki potensi seni dan tradisi kuat.
4) Tahun 2028 – Perluasan dan Pemerataan
   - Lokus utama diarahkan ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sebagai prioritas pembangunan akses pendidikan.
   - Lokus layanan pendidikan inklusif diperkuat pada sekolah penyelenggara pendidikan khusus dan sekolah reguler yang menerima ABK (anak berkebutuhan khusus).
5) Tahun 2029 – Pemantapan dan Keberlanjutan
   - Lokus terpusat pada seluruh satuan pendidikan melalui evaluasi menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan.
   - Lokus juga menyasar program best practices yang sudah terbukti efektif, untuk diperluas penerapannya ke sekolah lain.

**d. Arah Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029, diperlukan penetapan strategi yang tepat serta arah kebijakan yang terukur. Strategi difokuskan pada upaya memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, memenuhi sarana prasarana yang

memadai, melestarikan kebudayaan lokal, serta memperkuat tata kelola yang akuntabel.

Arah kebijakan yang ditetapkan berfungsi sebagai pedoman implementasi program, agar pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga outcome yang berkelanjutan. Setiap strategi disusun dengan memperhatikan integrasi antara kebijakan daerah (RPJMD) dengan program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Guru Nyaman Bekerja, Revitalisasi 1.000 Sekolah, hingga penguatan budaya melalui GUS WARIS.

Dengan kerangka ini, kebijakan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian budaya, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tabel 3.6

Strategi Dan Arah Kebijakan

| Tujuan | Sasaran Strategis | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| **Meratanya Akses Pendidikan dan Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal** | **Meningkatnya Partisipasi Pendidikan pada Jenjang PAUD, Dasar, dan Nonformal** | Pemerataan Kualitas dan Pemenuhan Akses Penunjang Layanan Pendidikan | • Revitalisasi sarana prasarana sekolah yang rusak, terutama di daerah 3T<br>• Pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru di wilayah padat penduduk<br>• Penguatan program beasiswa dan bantuan sosial untuk menekan angka ATS, selaras dengan program 10.000 Beasiswa Sampai Sarjana dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG<br>• Pengembangan PAUD Holistik Integratif yang mencakup gizi, kesehatan, dan perlindungan. |
| | **Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik | • Peningkatan kualifikasi guru dan sertifikasi melalui program pelatihan berkelanjutan, seperti Platform |

| Tujuan | Sasaran Strategis | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| | | | Merdeka Mengajar (PMM)<br>• Distribusi guru yang merata dan penempatan ASN yang proporsional sesuai kebutuhan sekolah, sejalan dengan program GURU NYAMAN BEKERJA<br>• Peningkatan kesejahteraan guru honorer dan insentif untuk guru di daerah terpencil. |
| | **Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan yang Memadai** | Peningkatan mutu dan ketersediaan sarana pendidikan | • Pemenuhan sarana dan prasarana TIK yang menunjang pembelajaran digital, termasuk pengembangan Science Center<br>• Pengadaan sarana belajar yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap bencana alam-Revitalisasi sarana pendidikan yang rusak, selaras dengan program Rehab 1.000 Sekolah. |
| | **Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal** | Melestarikan dan merevitalisasi warisan budaya | • Inventarisasi dan pendokumentasian warisan budaya benda dan takbenda<br>• Fasilitasi dan pembinaan komunitas seni dan budaya, termasuk sanggar<br>• sanggar seni, sejalan dengan inisiatif GUS WARIS<br>• Perlindungan cagar budaya dan situs sejarah daerah. |
| | **Terintegrasinya Kebudayaan dalam Sistem Pendidikan dan Pariwisata** | Pemanfaatan kekayaan budaya sebagai sumber belajar | • Integrasi muatan lokal (sejarah, seni, dan tradisi) ke dalam Kurikulum Merdeka<br>• Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang berkelanjutan<br>• Kemitraan dengan sektor pariwisata untuk mengembangkan wisata |

| Tujuan | Sasaran Strategis | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| | | | edukasi berbasis budaya. |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah** | Penguatan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif | • Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang berorientasi hasil, selaras dengan program PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI<br>• Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, termasuk Dana BOS<br>• Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. |

# BAB IV
# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan

Bagian operasional dari Rencana Strategis ini menguraikan secara rinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo pada periode 2025–2029. nomenklatur mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sementara pagu indikatif yang ditampilkan merupakan perkiraan awal dan akan disesuaikan setiap tahunnya melalui proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA.

Untuk menerjemahkan tujuan dan sasaran strategis disusun kerangka program yang menjadi payung bagi berbagai kegiatan prioritas. Tabel berikut menyajikan daftar program utama yang akan dilaksanakan, dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel berikut menyajikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo pada periode perencanaan tahun 2025–2029. Setiap program dilengkapi dengan definisi operasional dan formula perhitungan indikator kinerja, sebagai acuan dalam pengukuran capaian dan efektivitas pelaksanaan program secara terukur dan akuntabel.

Tabel 4.1

Program Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASE LINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | 782.607.261.846,69 | | 791.303.240.000 | | 803.093.420.800 | | 819.477.643.216 | | 838.690.108.080 | |
| **1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | 633.796.675.683,69 | | 640.838.200.000 | | 650.386.700.000 | | 663.654.600.000 | | 679.214.000.000 | |
| **Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD** | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 80,51 | 81,32 | 82,12 | 633.796.675.683,69 | 82,93 | 640.838.200.000 | 83,73 | 650.386.700.000 | 84,54 | 663.654.600.000 | 85,34 | 679.214.000.000 | |
| **1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | 148.408.586.163 | | 150.057.500.000 | | 152.293.400.000 | | 155.400.200.000 | | 159.043.600.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASE LINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **Meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah pada layanan pendidikan PAUD, dasar, dan nonformal** | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 5-6 Tahun (%) | 99,54 | 100 | 100 | 148.408.586.163 | 100 | 150.057.500.000 | 100 | 152.293.400.000 | 100 | 155.400.200.000 | 100 | 159.043.600.000 | |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun (%) | 90,74 | 90,56 | 91,16 | | 91,37 | | 91,58 | | 91,79 | | 92 | | |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun (%) | 99,56 | 99,77 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan (%) | 94,24 | 99,34 | 95,44 | | 96,54 | | 97,64 | | 98,74 | | 99,84 | | |
| | Persentase Penduduk usia 19-59 yang mengikuti | 0,2 | 0,21 | 0,22 | | 0,23 | | 0,24 | | 0,25 | | 0,26 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASE LINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | PNF/Keseteraan (%) | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | 50.000.000 | | 50.600.000 | | 51.400.000 | | 52.500.000 | | 53.800.000 | |
| **Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan** | Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%) | 93,49 | 93,85 | 93,85 | 50.000.000 | 95,14 | 50.600.000 | 95,85 | 51.400.000 | 96,57 | 52.500.000 | 97,28 | 53.800.000 | |
| **1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | 150.000.000 | | 151.700.000 | | 154.000.000 | | 157.200.000 | | 160.900.000 | |
| **Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan** | Indeks Distribusi Guru (Indeks) | 41.072.088 | 42.073.089 | 43.074.090 | 50.000.000 | 44.075.090 | 51.000.000 | 45.076.091 | 52.000.000 | 45.077.091 | 53.000.000 | 46.078.092 | 54.000.000 | |
| | Persentase Guru yang memiliki | 51,69 | 51,73 | 51,78 | | 51,83 | | 51,87 | | 51,92 | | 51,97 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASE LINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Sertifikat Pendidik (%) | | | | | | | | | | | | | |
| **Meningkatnya pemenuhan dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan** | Persentase Satuan Pendidikan yang terpenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik (%) | 65,75 | 66,21 | 66,97 | 100.000.000 | 67,74 | 100.700.000 | 68,5 | 102.000.000 | 69,27 | 104.200.000 | 70,03 | 106.900.000 | |
| **1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | | | | | 102.000.000 | | 104.040.000 | | 105.120.800 | | 108.243.216 | | 110.408.080 | |
| **Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi Pendidikan** | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%) | 100 | 100 | 100 | 50.000.000 | 100 | 51.000.000 | 100 | 51.000.000 | 100 | 53.000.000 | 100 | 54.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASE LINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **Meningkatnya kepemilikan perizinan satuan pendidikan sesuai ketentuan** | Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan yang memiliki perizinan yang berlaku (%) | 35,81 | 40,29 | 43,87 | 52.000.000 | 47,45 | 53.040.000 | 51,03 | 54.120.800 | 54,61 | 55.243.216 | 58,19 | 56.408.080 | |
| | Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memiliki perizinan yang berlaku (%) | 38,78 | 48,98 | 54,08 | | 59,18 | | 64,29 | | 69,39 | | 79,59 | | |
| **1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | | | 100.000.000 | | 101.200.000 | | 102.800.000 | | 104.900.000 | | 107.400.000 | |
| **Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah** | Persentase pengembangan bahasa dan sastra (%) | 65,36 | 66,67 | 68 | 100.000.000 | 69,33 | 101.200.000 | 70,67 | 102.800.000 | 72 | 104.900.000 | 71,9 | 107.400.000 | |
| **2.22 - URUSAN PEMERINT** | | | | | 1.420.000.000 | | 1.435.900.000 | | 1.457.500.000 | | 1.487.300.000 | | 1.522.300.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASE LINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **AHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | 800.000.000 | | 807.500.000 | | 817.400.000 | | 833.200.000 | | 852.100.000 | |
| **Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan** | Persentase Obyek Budaya yang dikembangkan (%) | 50 | 55 | 58 | 800.000.000 | 62 | 807.500.000 | 69 | 817.400.000 | 71 | 833.200.000 | 79 | 852.100.000 | |
| **2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | | | 500.000.000 | | 505.600.000 | | 513.200.000 | | 523.700.000 | | 536.000.000 | |
| **Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan** | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%) | 33,33 | 37,5 | 37,5 | 500.000.000 | 40 | 505.600.000 | 40 | 513.200.000 | 45,45 | 523.700.000 | 45,45 | 536.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASE LINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **Kesenian Tradisional** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | 70.000.000 | | 70.800.000 | | 71.900.000 | | 73.400.000 | | 75.200.000 | |
| **Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan** | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase) | 28,57 | 28,57 | 33,33 | 70.000.000 | 33,33 | 70.800.000 | 38,1 | 71.900.000 | 38,1 | 73.400.000 | 42,86 | 75.200.000 | |
| | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | 57,14 | 57,14 | 61,9 | | 66,67 | | 71,43 | | 76,19 | | 80,95 | | |
| **2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | | | 50.000.000 | | 52.000.000 | | 55.000.000 | | 57.000.000 | | 59.000.000 | |
| **Meningkatnya Tata** | Persentase Koleksi | 4 | 4 | 6 | 50.000.000 | 8 | 52.000.000 | 10 | 55.000.000 | 12 | 57.000.000 | 14 | 59.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASE LINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **Kelola Museum** | Museum Yang Dihimpun (%) | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | | 784.027.261.846,69 | | 792.739.140.000,00 | | 804.550.920.800,00 | | 820.964.943.216,00 | | 840.212.408.080,00 | |

Untuk menjamin keselarasan antara perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dokumen perencanaan daerah yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo, diperlukan sebuah kerangka kerja yang sistematis. Kerangka ini bertujuan untuk menerjemahkan sasaran dan indikator makro yang termuat dalam RPJMD ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang operasional dan terukur di tingkat perangkat daerah.

Proses perumusan ini dilakukan melalui pendekatan kinerja yang logis, di mana setiap program dan kegiatan yang dirancang memiliki korelasi langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia, dapat dipertanggungjawabkan efektivitasnya dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah di sektor pendidikan dan kebudayaan.

Tabel 4.2 berikut ini menyajikan secara rinci teknik perumusan program, kegiatan, hingga subkegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tabel ini memvisualisasikan alur penjenjangan (cascading) mulai dari Sasaran RPJMD yang relevan, kemudian diturunkan menjadi Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah, hingga pada akhirnya terurai menjadi keluaran (output) dan hasil (outcome) yang spesifik. Setiap tingkatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas sebagai alat ukur keberhasilan, sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di kemudian hari.

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | | | | | | | |
| **- Meratanya Akses Pendidikan - Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal** | Meratanya Akses Pendidikan dan Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal | | | | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | | |
| | | | | | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun)) | | |
| | | | | | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%)) | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (%) | | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun (%) | | |
| | | | | | Prosentase Anak Tidak Sekolah (ATS) (%) | | |
| | | | Meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah pada layanan pendidikan PAUD, dasar, dan nonformal | | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 5-6 Tahun (%) | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun (%) | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun (%) | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan (Nilai) | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | | Persentase Penduduk usia 19-59 yang mengikuti PNF/Kesetaraan (%) | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | proporsi jumlah satuan SD yang mendapatkan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | minimal akreditasi B | Didik yang Tersedia (Paket) | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | proporsi jumlah satuan SD yang mendapatkan minimal akreditasi B | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan | 1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) | 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | |
| | | | | proporsi jumlah satuan SD yang mendapatkan minimal akreditasi B | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) | 1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di | 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bidang Pendidikan (Dokumen) | | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kemampuan Literasi SD | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) | 1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | |
| | | | | Kemampuan Numerasi SD | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | |
| | | | | Iklim keamanan SD | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | |
| | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | kekerasan, dan intoleransi | |
| | | | | Iklim kebhinekaan SD | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | |
| | | | | Iklim inklusivitas SD | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | proporsi jumlah satuan SMP yang mendapatkan minimal akreditasi B | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | proporsi jumlah satuan SMP yang mendapatkan minimal akreditasi B | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah | 1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | |
| | | | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) | 1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang | 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | proporsi jumlah satuan SMP yang mendapatkan minimal akreditasi B | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | |
| | | | | Kemampuan Literasi SMP | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | |
| | | | | Kemampuan Numerasi SMP | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | |
| | | | | Iklim keamanan SMP | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Akademik (Peserta Didik) | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | |
| | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | |
| | | | | Iklim kebhinekaan SMP | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | |
| | | | | Iklim inklusivitas SMP | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | yang dilaksanakan (Dokumen) | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | |
| | | | | proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) | 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | |
| | | | | | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | |
| | | | | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | |
| | | | | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD | |
| | | | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) | 1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di | 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bidang Pendidikan (Dokumen) | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | |
| | | | | Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV) | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) | 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | |
| | | | | proporsi jumlah satuan PNF yang mendapatkan minimal akreditasi B | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | yang dilaksanakan (Dokumen) | | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | |
| | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang | 1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Telah Dibangun (Ruang) | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) | 1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) | 1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | |
| | | | | Jumlah Peserta Didik yang mengikuti | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Dana BOP (Satuan Pendidikan) | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | | Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%) | 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | |
| | | | | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan kurikulum muatan local | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) | 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen) | 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) | 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) | 1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) | 1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen) | 1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang melaksanakan kurikulum muatan local | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku) | 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan | 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nonformal yang tersusun (Dokumen) | Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | | | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku) | 1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen) | 1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | Meningkatnya pemenuhan dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan | | Persentase Satuan Pendidikan yang terpenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik (%) | 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |
| | | | | Proporsi guru dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV) | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan) | 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan) | 1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | Meningkatnya kepemilikan perizinan satuan pendidikan sesuai ketentuan | | Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan yang memiliki perizinan yang berlaku (%) | 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | |
| | | | | | Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memiliki perizinan yang berlaku (%) | 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Jumlah Perizinan Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang berlaku | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh | 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Masyarakat (Dokumen) | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |
| | | | Terlestarikanny a bahasa dan sastra daerah | | Persentase pengembangan bahasa dan sastra (%) | 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | |
| | | | | Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa) | 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku) | 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media) | 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen) | 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa) | 1.01.06.2.01.0002 - Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen) | 1.01.06.2.01.0007 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku) | 1.01.06.2.01.0008 - Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah | |
| | | | | | Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media) | 1.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi media publik berbahasa daerah | |
| | | Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal | | | Persentase Obyek Kebudayaan yang dilestarikan (%) | | |
| | | | | | Nilai Pemantauan dan Evaluasi PPKD (Nilai) | | |
| | | | Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan | | Persentase Obyek Budaya yang dikembangkan (%) | 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | |
| | | | | Jumlah objek kebudayaan yang dilestarikan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, | 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | 2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | |
| | | | | | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | 2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | |
| | | | | Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan) | 2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang | 2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) | Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) | 2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan) | 2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | |
| | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional | | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%) | 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | |
| | | | | Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | 2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | 2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | |
| | | | Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan | | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase) | 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | |
| | | | | | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | jumlah cagar budaya yang ditetapkan | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) | 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) | 2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | 2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya | |
| | | | | Jumlah cagar budaya yang dikelola | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) | 2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) | 2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) | 2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) | 2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Telah Disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |
| | | | | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | |
| | | | | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 1.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | Jumlah Jasa Penunjang Urusan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pemerintahan yang Tersedia | Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 1.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |

Setelah program, kegiatan, dan subkegiatan dirumuskan sebagai penjabaran dari sasaran strategis, langkah selanjutnya dalam kerangka perencanaan berbasis kinerja adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan sekumpulan indikator yang dianggap paling penting dan relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Penetapan IKU ini krusial untuk memastikan bahwa seluruh upaya dan sumber daya yang dialokasikan benar-benar fokus pada pencapaian hasil yang paling prioritas.

Indikator Kinerja Utama yang dipilih mencerminkan aspek-aspek fundamental dari tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang meliputi peningkatan akses dan mutu pendidikan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan. Indikator seperti Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Angka Partisipasi Sekolah menjadi tolok ukur keberhasilan di sektor pendidikan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Kebudayaan dan persentase pelestarian obyek kebudayaan menjadi cerminan kinerja di bidang kebudayaan. Selain itu, akuntabilitas kinerja internal juga diukur melalui indikator Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP).

Tabel berikut menyajikan secara rinci daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tabel ini dilengkapi dengan data awal (baseline) pada tahun 2024 sebagai titik pijak, serta target kuantitatif yang jelas dan terukur untuk setiap tahun dalam periode perencanaan hingga tahun 2030. Penetapan target ini menjadi komitmen kinerja dinas dan akan digunakan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel.

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Renstra  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **1.** | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | |
| **1** | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,64 | 12,88 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | |
| **2** | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun | (tahun) | 6,31 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8 | |
| **3** | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | (%) | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | |
| **4** | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | -1,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| **5** | Persentase Obyek Kebudayaan yang dilestarikan | % | 59,38 | 59,5 | 60 | 61 | 62 | 63,5 | 65 | |
| **6** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun<br><br>*Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** | % | 90,56 | 93,12 | 95,97 | 98,21 | 100 | 100 | 100 | |
| **7** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun<br><br>*Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** | % | 97,33 | 97,55 | 97,77 | 97,98 | 98,2 | 98,42 | 98,63 | |
| **8** | Nilai Pemantauan dan Evaluasi PPKD | Nilai | 0 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | |
| **9** | Prosentase Anak Tidak Sekolah (ATS) | % | 3,9 | 3,59 | 3,43 | 3,27 | 3,11 | 2,96 | 2,8 | |

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Probolinggo

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **1.** | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| **2.** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun<br>*Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** | Positif | % | 99,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **3.** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun<br>*Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar** | Positif | % | 99,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun<br>*Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** | Positif | % | 97,33 | 97,55 | 97,77 | 97,98 | 98,2 | 98,42 | 98,63 | |
| **4.** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan<br>*Jumlah Warga Negara Usia* | Positif | % | 94,24 | 94,34 | 95,44 | 96,54 | 97,64 | 98,74 | 99,84 | |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | *7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)** | | | | | | | | | | |
| **5.** | Iklim Inklusivitas SD | Positif | Nilai | 59,21 | 61,21 | 63,21 | 65,21 | 67,21 | 69,21 | 71,21 | |
| **6.** | Iklim Inklusivitas SMP | Positif | Nilai | 55,07 | 55,77 | 56,47 | 57,17 | 57,87 | 58,57 | 59,27 | |
| **7.** | Iklim Keamanan SD | Positif | Nilai | 74,21 | 77,21 | 80,21 | 83,21 | 86,21 | 89,21 | 92,21 | |
| **8.** | Iklim Keamanan SMP | Positif | Nilai | 67,09 | 68,09 | 69,09 | 70,09 | 71,09 | 72,09 | 73,09 | |
| **9.** | Iklim Kebhinekaan SD | Positif | Nilai | 71,12 | 73,12 | 75,12 | 77,12 | 79,12 | 81,12 | 83,12 | |
| **10.** | Iklim Kebinekaan SMP | Positif | Nilai | 68,43 | 70,93 | 73,43 | 75,93 | 78,43 | 80,93 | 83,43 | |
| **11.** | Kemampuan Literasi SD *Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional** | Positif | % | 79,03 | 80,03 | 81,03 | 82,03 | 83,03 | 84,03 | 85,03 | |
| **12.** | Kemampuan Literasi SMP *Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional** | Positif | % | 70,9 | 72,9 | 74,9 | 76,9 | 78,9 | 80,9 | 82,9 | |
| **13.** | Kemampuan Numerasi SD *Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional** | Positif | % | 764,31 | 76,31 | 78,31 | 80,31 | 82,31 | 84,31 | 86,31 | |
| **14.** | Kemampuan Numerasi SMP *Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional** | Positif | % | 70,34 | 72,34 | 74,34 | 76,34 | 78,34 | 80,34 | 82,34 | |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **15.** | Proporsi Guru PAUD Formal S1/D IV<br>*Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV** | Positif | % | 50,25 | 52,25 | 54,84 | 55,84 | 56,84 | 57,84 | 58,84 | |
| **16.** | Proporsi PAUD Akreditasi Minimal B<br>*Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV** | Positif | % | 63,79 | 64,21 | 64,62 | 65,03 | 65,44 | 65,85 | 66,26 | |
| **17.** | Prosentase Anak Tidak Sekolah (ATS) | Positif | % | 3,9 | 3,59 | 3,43 | 3,27 | 3,11 | 2,96 | 2,8 | |
| **18.** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun<br>*Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama** | | % | 98,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **19.** | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | |
| **20.** | Nilai Pemantauan dan Evaluasi PPKD | | Nilai | 0 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | |
| **21.** | Persentase Obyek Kebudayaan yang dilestarikan | positif | % | 59,38 | 59,5 | 60 | 61 | 62 | 63,5 | 65 | |

## 4.2 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, Target, dan Pendanaan Indikatif

Untuk menjamin objektivitas, validitas, dan reliabilitas dalam pengukuran kinerja, setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perlu diperjelas melalui definisi operasional. Definisi operasional memberikan panduan yang seragam dan terperinci mengenai konsep, cara pengukuran, dan sumber data dari setiap indikator, sehingga menghilangkan ambiguitas dan potensi kesalahan interpretasi selama proses pengumpulan dan analisis data.

Tahap ini merupakan jembatan antara perencanaan konseptual dengan implementasi teknis di lapangan. Dengan adanya definisi operasional yang jelas, setiap pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi akan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan konsistensi data dari waktu ke waktu serta akurasi dalam pelaporan capaian kinerja.

Tabel di bawah ini menyajikan uraian lengkap mengenai definisi operasional untuk setiap indikator program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rincian dalam tabel ini mencakup penjelasan detail mengenai setiap indikator, formula perhitungannya, serta keterkaitannya dengan program atau kegiatan spesifik yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengukuran kinerja merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menetapkan serangkaian Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator-indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk menilai pencapaian sasaran strategis yang telah diamanatkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memegang peranan vital dalam pencapaian sebagian besar Indikator Kinerja Daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan. Indikator yang menjadi tanggung jawab dinas ini tidak hanya mencerminkan kinerja sektoral, tetapi juga merupakan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4.3 di bawah ini merincikan Indikator Kinerja Daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator tersebut dikelompokkan ke dalam dua kategori utama: Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang mengukur dampak pembangunan secara luas, dan Indikator Kinerja Kunci yang lebih spesifik mengukur output dan outcome program prioritas. Setiap indikator dilengkapi dengan data awal (baseline) tahun 2024 dan target capaian yang terukur secara bertahap hingga tahun 2030. Penetapan target ini menjadi acuan dan komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan dan melestarikan kekayaan budaya di Kabupaten Probolinggo.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Daerah

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | | | | | | | | | | |
| **I** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| **1** | Harapan Lama Sekolah* | Tahun | 12,64 | 12,88 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | |
| **2** | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun* | (tahun) | 6,31 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8 | |
| **3** | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)* | (%) | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | |
| **II** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | | | | | |
| **1** | Proporsi PAUD Akreditasi Minimal B<br>*Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B** | % | 63,79 | 64,21 | 64,62 | 65,03 | 65,44 | 65,85 | 66,26 | |
| **2** | Iklim Kebhinekaan SD* | Nilai | 71,12 | 73,12 | 75,12 | 77,12 | 79,12 | 81,12 | 83,12 | |
| **3** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun<br>*Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar** | Nilai | 99,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **4** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun<br>*Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama** | % | 98,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **5** | Iklim Kebinekaan SMP* | Nilai | 68,43 | 70,93 | 73,43 | 75,93 | 78,43 | 80,93 | 83,43 | |
| **6** | Kemampuan Numerasi SD<br>Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional* | % | 764,31 | 76,31 | 78,31 | 80,31 | 82,31 | 84,31 | 86,31 | |
| **7** | Prosentase Anak Tidak Sekolah (ATS) | % | 3,9 | 3,59 | 3,43 | 3,27 | 3,11 | 2,96 | 2,8 | |
| **8** | Iklim Keamanan SD* | Nilai | 74,21 | 77,21 | 80,21 | 83,21 | 86,21 | 89,21 | 92,21 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun<br>*Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** | % | 99,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **10** | Iklim Inklusivitas SD* | Nilai | 59,21 | 61,21 | 63,21 | 65,21 | 67,21 | 69,21 | 71,21 | |
| **11** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan<br>*Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan** | % | 94,24 | 94,34 | 95,44 | 96,54 | 97,64 | 98,74 | 99,84 | |
| **12** | Persentase Obyek Kebudayaan yang dilestarikan | % | 59,38 | 59,5 | 60 | 61 | 62 | 63,5 | 65 | |
| **13** | Proporsi Guru PAUD Formal S1/D IV<br>*Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV** | % | 50,25 | 52,25 | 54,84 | 55,84 | 55,84 | 56,84 | 57,84 | |
| **14** | Kemampuan Numerasi SMP<br>*Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional** | % | 70,34 | 72,34 | 74,34 | 76,34 | 78,34 | 80,34 | 82,34 | |
| **15** | Nilai Pemantauan dan Evaluasi PPKD | Nilai | 0 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | |
| **16** | Iklim Inklusivitas SMP | Nilai | 55,07 | 55,77 | 56,47 | 57,17 | 57,87 | 58,57 | 59,27 | |
| **17** | Kemampuan Literasi SMP<br>*Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional** | % | 70,9 | 72,9 | 74,9 | 76,9 | 78,9 | 80,9 | 82,9 | |
| **18** | Kemampuan Literasi SD<br>*Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional* | % | 79,03 | 80,03 | 81,03 | 82,03 | 83,03 | 84,03 | 85,03 | |
| **19** | Iklim Keamanan SMP | Nilai | 67,09 | 68,09 | 69,09 | 70,09 | 71,09 | 72,09 | 73,09 | |

Keterangan : *) Master Indikator Pusat - SIPD

Tabel 4.7

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | 782.607.261.846,69 | | 791.303.240.000 | | 803.093.420.800 | | 819.477.643.216 | | 838.690.108.080 |
| **1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | 633.796.675.683,69 | | 640.838.200.000 | | 650.386.700.000 | | 663.654.600.000 | | 679.214.000.000 |
| **Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD** | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 80,51 | 82,12 | 633.796.675.683,69 | 82,93 | 640.838.200.000 | 83,73 | 650.386.700.000 | 84,54 | 663.654.600.000 | 85,34 | 679.214.000.000 |
| **1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | 514.250.000 | | 565.675.000 | | 622.242.500 | | 684.466.750 | | 752.913.425 |
| **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Telah Disusun** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 2 | 514.250.000 | 2 | 565.675.000 | 2 | 622.242.500 | 2 | 684.466.750 | 2 | 752.913.425 |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| **1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | | | | 90.750.000 | | 99.825.000 | | 109.807.500 | | 120.788.250 | | 132.867.075 |
| **Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 2 | 90.750.000 | 2 | 99.825.000 | 2 | 109.807.500 | 2 | 120.788.250 | 2 | 132.867.075 |
| **1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan** | | | | 90.750.000 | | 99.825.000 | | 109.807.500 | | 120.788.250 | | 132.867.075 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Dokumen RKA-SKPD** | | | | | | | | | | | | |
| **Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 3 | 3 | 90.750.000 | 3 | 99.825.000 | 3 | 109.807.500 | 3 | 120.788.250 | 3 | 132.867.075 |
| **1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | | | | 90.750.000 | | 99.825.000 | | 109.807.500 | | 120.788.250 | | 132.867.075 |
| **Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | 4 | 90.750.000 | 4 | 99.825.000 | 4 | 109.807.500 | 4 | 120.788.250 | 4 | 132.867.075 |
| **1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | 242.000.000 | | 266.200.000 | | 292.820.000 | | 322.102.000 | | 354.312.200 |
| **Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat | 4 | 4 | 242.000.000 | 4 | 266.200.000 | 4 | 292.820.000 | 4 | 322.102.000 | 4 | 354.312.200 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | 602.984.075.683,69 | | 606.994.840.000 | | 613.211.004.000 | | 622.814.834.400 | | 634.345.257.840 |
| **Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 5 | 602.984.075.683,69 | 5 | 606.994.840.000 | 5 | 613.211.004.000 | 5 | 622.814.834.400 | 5 | 634.345.257.840 |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 5.210 | 5.250 | | 5.300 | | 5.350 | | 5.400 | | 5.450 | |
| **1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | 602.681.575.683,69 | | 606.662.090.000 | | 612.844.979.000 | | 622.412.206.900 | | 633.902.367.590 |
| **Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN** | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 5.210 | 5.250 | 602.681.575.683,69 | 5.300 | 606.662.090.000 | 5.350 | 612.844.979.000 | 5.400 | 622.412.206.900 | 5.450 | 633.902.367.590 |
| **1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** | | | | 302.500.000 | | 332.750.000 | | 366.025.000 | | 402.627.500 | | 442.890.250 |
| **Terlaksananya Penatausahaan** | Jumlah Dokumen | 5 | 5 | 302.500.000 | 5 | 332.750.000 | 5 | 366.025.000 | 5 | 402.627.500 | 5 | 442.890.250 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** | Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | 60.500.000 | | 66.550.000 | | 73.205.000 | | 80.525.500 | | 88.578.050 |
| **Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 7 | 7 | 60.500.000 | 7 | 66.550.000 | 7 | 73.205.000 | 7 | 80.525.500 | 7 | 88.578.050 |
| **1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD** | | | | 60.500.000 | | 66.550.000 | | 73.205.000 | | 80.525.500 | | 88.578.050 |
| **Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD** | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 7 | 7 | 60.500.000 | 7 | 66.550.000 | 7 | 73.205.000 | 7 | 80.525.500 | 7 | 88.578.050 |
| **1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | 121.000.000 | | 133.100.000 | | 146.410.000 | | 161.051.000 | | 177.156.100 |
| **Jumlah Dokumen Administrasi** | Jumlah Dokumen Monitoring, | 1 | 1 | 121.000.000 | 1 | 133.100.000 | 1 | 146.410.000 | 1 | 161.051.000 | 1 | 177.156.100 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Kepegawaian Perangkat Daerah** | Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai** | | | | 121.000.000 | | 133.100.000 | | 146.410.000 | | 161.051.000 | | 177.156.100 |
| **Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai** | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 1 | 1 | 121.000.000 | 1 | 133.100.000 | 1 | 146.410.000 | 1 | 161.051.000 | 1 | 177.156.100 |
| **1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | 1.494.350.000 | | 1.643.785.000 | | 1.808.163.500 | | 1.988.979.850 | | 2.187.877.835 |
| **Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7 | 7 | 1.494.350.000 | 7 | 1.643.785.000 | 7 | 1.808.163.500 | 7 | 1.988.979.850 | 7 | 2.187.877.835 |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 24 | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| **1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | | | | 30.250.000 | | 33.275.000 | | 36.602.500 | | 40.262.750 | | 44.289.025 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 30.250.000 | 1 | 33.275.000 | 1 | 36.602.500 | 1 | 40.262.750 | 1 | 44.289.025 |
| **1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | | | | 435.600.000 | | 479.160.000 | | 527.076.000 | | 579.783.600 | | 637.761.960 |
| **Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 24 | 24 | 435.600.000 | 24 | 479.160.000 | 24 | 527.076.000 | 24 | 579.783.600 | 24 | 637.761.960 |
| **1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | | | | 30.250.000 | | 33.275.000 | | 36.602.500 | | 40.262.750 | | 44.289.025 |
| **Tersedianya Peralatan Rumah Tangga** | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 3 | 3 | 30.250.000 | 3 | 33.275.000 | 3 | 36.602.500 | 3 | 40.262.750 | 3 | 44.289.025 |
| **1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | | | | 423.500.000 | | 465.850.000 | | 512.435.000 | | 563.678.500 | | 620.046.350 |
| **Tersedianya Bahan Logistik Kantor** | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 7 | 423.500.000 | 7 | 465.850.000 | 7 | 512.435.000 | 7 | 563.678.500 | 7 | 620.046.350 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | | | | 30.250.000 | | 33.275.000 | | 36.602.500 | | 40.262.750 | | 44.289.025 |
| **Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan** | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7 | 7 | 30.250.000 | 7 | 33.275.000 | 7 | 36.602.500 | 7 | 40.262.750 | 7 | 44.289.025 |
| **1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | | | | 423.500.000 | | 465.850.000 | | 512.435.000 | | 563.678.500 | | 620.046.350 |
| **Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 4 | 4 | 423.500.000 | 4 | 465.850.000 | 4 | 512.435.000 | 4 | 563.678.500 | 4 | 620.046.350 |
| **1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD** | | | | 121.000.000 | | 133.100.000 | | 146.410.000 | | 161.051.000 | | 177.156.100 |
| **Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD** | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada | 1 | 1 | 121.000.000 | 1 | 133.100.000 | 1 | 146.410.000 | 1 | 161.051.000 | 1 | 177.156.100 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | 5.263.500.000 | | 5.789.850.000 | | 6.368.835.000 | | 7.005.718.500 | | 7.706.290.350 |
| **Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 20 | 20 | 5.263.500.000 | 20 | 5.789.850.000 | 20 | 6.368.835.000 | 20 | 7.005.718.500 | 20 | 7.706.290.350 |
| | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| **1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel** | | | | 181.500.000 | | 199.650.000 | | 219.615.000 | | 241.576.500 | | 265.734.150 |
| **Tersedianya Mebel** | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | 2 | 181.500.000 | 2 | 199.650.000 | 2 | 219.615.000 | 2 | 241.576.500 | 2 | 265.734.150 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | | | | 242.000.000 | | 266.200.000 | | 292.820.000 | | 322.102.000 | | 354.312.200 |
| **Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya** | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 20 | 20 | 242.000.000 | 20 | 266.200.000 | 20 | 292.820.000 | 20 | 322.102.000 | 20 | 354.312.200 |
| **1.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya** | | | | 3.630.000.000 | | 3.993.000.000 | | 4.392.300.000 | | 4.831.530.000 | | 5.314.683.000 |
| **Tersedianya Aset Tetap Lainnya** | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 20 | 20 | 3.630.000.000 | 20 | 3.993.000.000 | 20 | 4.392.300.000 | 20 | 4.831.530.000 | 20 | 5.314.683.000 |
| **1.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud** | | | | 1.210.000.000 | | 1.331.000.000 | | 1.464.100.000 | | 1.610.510.000 | | 1.771.561.000 |
| **Tersedianya Aset Tak Berwujud** | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 20 | 20 | 1.210.000.000 | 20 | 1.331.000.000 | 20 | 1.464.100.000 | 20 | 1.610.510.000 | 20 | 1.771.561.000 |
| **1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | 22.341.000.000 | | 24.575.100.000 | | 27.032.610.000 | | 29.735.871.000 | | 32.709.458.100 |
| **Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Tersedia** | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 12 | 22.341.000.000 | 12 | 24.575.100.000 | 12 | 27.032.610.000 | 12 | 29.735.871.000 | 12 | 32.709.458.100 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| **1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | | | | 605.000.000 | | 665.500.000 | | 732.050.000 | | 805.255.000 | | 885.780.500 |
| **Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 605.000.000 | 12 | 665.500.000 | 12 | 732.050.000 | 12 | 805.255.000 | 12 | 885.780.500 |
| **1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | | | | 21.736.000.000 | | 23.909.600.000 | | 26.300.560.000 | | 28.930.616.000 | | 31.823.677.600 |
| **Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor** | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 21.736.000.000 | 12 | 23.909.600.000 | 12 | 26.300.560.000 | 12 | 28.930.616.000 | 12 | 31.823.677.600 |
| **1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | 1.018.000.000 | | 1.069.300.000 | | 1.124.230.000 | | 1.183.153.000 | | 1.246.468.300 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara** | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 186 | 186 | 1.018.000.000 | 186 | 1.069.300.000 | 186 | 1.124.230.000 | 186 | 1.183.153.000 | 186 | 1.246.468.300 |
| | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| **1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | | | | 242.000.000 | | 266.200.000 | | 292.820.000 | | 322.102.000 | | 354.312.200 |
| **Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara | 186 | 186 | 242.000.000 | 186 | 266.200.000 | 186 | 292.820.000 | 186 | 322.102.000 | 186 | 354.312.200 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud** | | | | 121.000.000 | | 133.100.000 | | 146.410.000 | | 161.051.000 | | 177.156.100 |
| **Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud** | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 121.000.000 | 2 | 133.100.000 | 2 | 146.410.000 | 2 | 161.051.000 | 2 | 177.156.100 |
| **1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | | | | 655.000.000 | | 670.000.000 | | 685.000.000 | | 700.000.000 | | 715.000.000 |
| **Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | 5 | 655.000.000 | 5 | 670.000.000 | 5 | 685.000.000 | 5 | 700.000.000 | 5 | 715.000.000 |
| **1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | 148.408.586.163 | | 150.057.500.000 | | 152.293.400.000 | | 155.400.200.000 | | 159.043.600.000 |
| **Meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah pada layanan pendidikan PAUD, dasar, dan nonformal** | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 5-6 Tahun (%) | 99,54 | 100 | 148.408.586.163 | 100 | 150.057.500.000 | 100 | 152.293.400.000 | 100 | 155.400.200.000 | 100 | 159.043.600.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 â€“ 15 tahun (%) | 90,74 | 91,16 | | 91,37 | | 91,58 | | 91,79 | | 92 | |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 â€“ 12 tahun (%) | 99,56 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan (%) | 94,24 | 95,44 | | 96,54 | | 97,64 | | 98,74 | | 99,84 | |
| | Persentase Penduduk usia 19-59 yang mengikuti PNF/Kesetaraan (%) | 0,2 | 0,22 | | 0,23 | | 0,24 | | 0,25 | | 0,26 | |
| **1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | | 72.425.052.763 | | 70.791.837.200 | | 69.753.587.800 | | 70.626.248.400 | | 72.004.509.000 |
| **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD** | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 624 | 624 | 49.490.502.763 | 624 | 46.913.237.200 | 624 | 44.930.937.800 | 624 | 44.864.548.400 | 624 | 45.298.759.000 |
| **1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar** | | | | 49.490.502.763 | | 46.913.237.200 | | 44.930.937.800 | | 44.864.548.400 | | 45.298.759.000 |
| **Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar** | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana | 624 | 624 | 49.490.502.763 | 624 | 46.913.237.200 | 624 | 44.930.937.800 | 624 | 44.864.548.400 | 624 | 45.298.759.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | BOS (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | |
| **Iklim inklusivitas SD** | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 |
| **Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan** | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 |
| **Iklim keamanan SD** | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | | | 139.150.000 | | 151.800.000 | | 164.450.000 | | 177.100.000 | | 189.750.000 |
| | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan | 230 | 230 | | 230 | | 230 | | 230 | | 230 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Non Akademik (Peserta Didik) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa** | | | | 139.150.000 | | 151.800.000 | | 164.450.000 | | 177.100.000 | | 189.750.000 |
| **Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik** | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 230 | 230 | 139.150.000 | 230 | 151.800.000 | 230 | 164.450.000 | 230 | 177.100.000 | 230 | 189.750.000 |
| **1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi** | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Iklim kebhinekaan SD** | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan | 125 | 125 | 30.250.000 | 125 | 33.000.000 | 125 | 35.750.000 | 125 | 38.500.000 | 125 | 41.250.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah** | | | | 30.250.000 | | 33.000.000 | | 35.750.000 | | 38.500.000 | | 41.250.000 |
| **Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah** | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) | 125 | 125 | 30.250.000 | 125 | 33.000.000 | 125 | 35.750.000 | 125 | 38.500.000 | 125 | 41.250.000 |
| **Kemampuan Literasi SD** | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) | | | 121.000.000 | | 132.000.000 | | 143.000.000 | | 154.000.000 | | 165.000.000 |
| | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 120 | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | |
| **1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **dan Non Teks Peserta Didik** | | | | | | | | | | | | |
| **Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks** | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan** | | | | 121.000.000 | | 132.000.000 | | 143.000.000 | | 154.000.000 | | 165.000.000 |
| **Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan** | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 120 | 120 | 121.000.000 | 120 | 132.000.000 | 120 | 143.000.000 | 120 | 154.000.000 | 120 | 165.000.000 |
| **Kemampuan Numerasi SD** | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 624 | 624 | 60.500.000 | 624 | 66.000.000 | 624 | 71.500.000 | 624 | 77.000.000 | 624 | 82.500.000 |
| **1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan** | | | | 60.500.000 | | 66.000.000 | | 71.500.000 | | 77.000.000 | | 82.500.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Proses Belajar Bagi Peserta Didik** | | | | | | | | | | | | |
| **Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik** | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 624 | 624 | 60.500.000 | 624 | 66.000.000 | 624 | 71.500.000 | 624 | 77.000.000 | 624 | 82.500.000 |
| **proporsi jumlah satuan SD yang mendapatkan minimal akreditasi B** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 0 | 5 | 22.508.650.000 | 5 | 23.420.800.000 | 5 | 24.332.950.000 | 5 | 25.240.100.000 | 5 | 26.152.250.000 |
| | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) | 624 | 624 | | 624 | | 624 | | 624 | | 624 | |
| | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 120 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 150 | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | |
| | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 0 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) | 1,817 | 1,817 | | 1,817 | | 1,817 | | 1,817 | | 1,817 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 55 | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | |
| | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) | 0 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 5 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| **1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Sekolah Baru yang Terbangun** | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU** | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 |
| **Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun** | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 |
| **Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun** | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah** | | | | 665.500.000 | | 726.000.000 | | 786.500.000 | | 847.000.000 | | 907.500.000 |
| **Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun** | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 2 | 2 | 665.500.000 | 2 | 726.000.000 | 2 | 786.500.000 | 2 | 847.000.000 | 2 | 907.500.000 |
| **1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | | | | 500.000.000 | | 525.000.000 | | 550.000.000 | | 575.000.000 | | 600.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 0 | 5 | 500.000.000 | 5 | 525.000.000 | 5 | 550.000.000 | 5 | 575.000.000 | 5 | 600.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 |
| **Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| **Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 |
| **Perpustakaan Sekolah yang** | Jumlah Perpustakaan | 0 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Terehabilitasi Sedang/Berat** | Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 |
| **Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah** | | | | 200.000.000 | | 225.000.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 200.000.000 |
| **Mebel Sekolah yang Tersedia** | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) | 0 | 4 | 200.000.000 | 4 | 225.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 275.000.000 | 4 | 200.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah** | | | | 500.000.000 | | 525.000.000 | | 550.000.000 | | 575.000.000 | | 600.000.000 |
| **Perlengkapan Sekolah yang Tersedia** | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 0 | 10 | 500.000.000 | 10 | 525.000.000 | 10 | 550.000.000 | 10 | 575.000.000 | 10 | 600.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan** | | | | 9.500.000.000 | | 9.600.000.000 | | 9.700.000.000 | | 9.800.000.000 | | 10.000.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | | | | | | | | | | |
| **Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) | 1,817 | 1,817 | 9.500.000.000 | 1,817 | 9.600.000.000 | 1,817 | 9.700.000.000 | 1,817 | 9.800.000.000 | 1,817 | 10.000.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | | 532.400.000 | | 580.800.000 | | 629.200.000 | | 677.600.000 | | 726.000.000 |
| **Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 55 | 55 | 532.400.000 | 55 | 580.800.000 | 55 | 629.200.000 | 55 | 677.600.000 | 55 | 726.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas** | | | | 30.250.000 | | 33.000.000 | | 35.750.000 | | 38.500.000 | | 41.250.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar** | | | | | | | | | | | | |
| **Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar** | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) | 624 | 624 | 30.250.000 | 624 | 33.000.000 | 624 | 35.750.000 | 624 | 38.500.000 | 624 | 41.250.000 |
| **1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan** | | | | 181.500.000 | | 198.000.000 | | 214.500.000 | | 231.000.000 | | 247.500.000 |
| **Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan** | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | 1 | 181.500.000 | 1 | 198.000.000 | 1 | 214.500.000 | 1 | 231.000.000 | 1 | 247.500.000 |
| **1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik** | | | | 616.000.000 | | 672.000.000 | | 728.000.000 | | 784.000.000 | | 840.000.000 |
| **Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik** | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1.000 | 1.000 | 616.000.000 | 1.000 | 672.000.000 | 1.000 | 728.000.000 | 1.000 | 784.000.000 | 1.000 | 840.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru** | | | | 500.000.000 | | 550.000.000 | | 600.000.000 | | 650.000.000 | | 700.000.000 |
| **Ruang Kelas Baru bertambah** | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 0 | 2 | 500.000.000 | 2 | 550.000.000 | 2 | 600.000.000 | 2 | 650.000.000 | 2 | 700.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | | | | 1.025.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.575.000.000 | | 1.850.000.000 | | 2.125.000.000 |
| **Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 20 | 20 | 1.025.000.000 | 20 | 1.300.000.000 | 20 | 1.575.000.000 | 20 | 1.850.000.000 | 20 | 2.125.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah** | | | | 5.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | 5.000.000.000 |
| **Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 120 | 50 | 5.000.000.000 | 50 | 5.000.000.000 | 50 | 5.000.000.000 | 50 | 5.000.000.000 | 50 | 5.000.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar** | | | | 1.408.000.000 | | 1.536.000.000 | | 1.664.000.000 | | 1.792.000.000 | | 1.920.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik** | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 150 | 150 | 1.408.000.000 | 150 | 1.536.000.000 | 150 | 1.664.000.000 | 150 | 1.792.000.000 | 150 | 1.920.000.000 |
| **1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik** | | | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.400.000.000 |
| **Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia** | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 5 | 10 | 1.000.000.000 | 10 | 1.100.000.000 | 10 | 1.200.000.000 | 10 | 1.300.000.000 | 10 | 1.400.000.000 |
| **1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | | 42.619.647.500 | | 42.981.060.000 | | 43.331.492.500 | | 42.641.915.000 | | 41.983.337.500 |
| **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP** | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 216 | 216 | 30.000.000.000 | 216 | 30.000.000.000 | 216 | 30.000.000.000 | 216 | 29.000.000.000 | 216 | 28.000.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama** | | | | 30.000.000.000 | | 30.000.000.000 | | 30.000.000.000 | | 29.000.000.000 | | 28.000.000.000 |
| **Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah** | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana | 216 | 216 | 30.000.000.000 | 216 | 30.000.000.000 | 216 | 30.000.000.000 | 216 | 29.000.000.000 | 216 | 28.000.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Menengah Pertama** | BOS (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | |
| **Iklim inklusivitas SMP** | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 2 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 |
| **Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan** | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 2 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 |
| **Iklim keamanan SMP** | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 216 | 216 | 181.500.000 | 216 | 198.000.000 | 216 | 214.500.000 | 216 | 231.000.000 | 216 | 247.500.000 |
| | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | intoleransi (Kegiatan) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa** | | | | 181.500.000 | | 198.000.000 | | 214.500.000 | | 231.000.000 | | 247.500.000 |
| **Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik** | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 216 | 216 | 181.500.000 | 216 | 198.000.000 | 216 | 214.500.000 | 216 | 231.000.000 | 216 | 247.500.000 |
| **1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi** | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Iklim kebhinekaan SMP** | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan | 216 | 216 | 50.000.000 | 216 | 50.000.000 | 216 | 50.000.000 | 216 | 50.000.000 | 216 | 50.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Pembinaan (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| **Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah** | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) | 216 | 216 | 50.000.000 | 216 | 50.000.000 | 216 | 50.000.000 | 216 | 50.000.000 | 216 | 50.000.000 |
| **Kemampuan Literasi SMP** | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 120 | 120 | 90.750.000 | 120 | 99.990.000 | 120 | 107.250.000 | 120 | 115.500.000 | 120 | 123.750.000 |
| **1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan** | | | | 90.750.000 | | 99.990.000 | | 107.250.000 | | 115.500.000 | | 123.750.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan** | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 120 | 120 | 90.750.000 | 120 | 99.990.000 | 120 | 107.250.000 | 120 | 115.500.000 | 120 | 123.750.000 |
| **Kemampuan Numerasi SMP** | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 216 | 216 | 91.657.500 | 216 | 99.990.000 | 216 | 108.322.500 | 216 | 116.655.000 | 216 | 124.987.500 |
| **1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik** | | | | 91.657.500 | | 99.990.000 | | 108.322.500 | | 116.655.000 | | 124.987.500 |
| **Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik** | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 216 | 216 | 91.657.500 | 216 | 99.990.000 | 216 | 108.322.500 | 216 | 116.655.000 | 216 | 124.987.500 |
| **proporsi jumlah satuan SMP yang mendapatkan minimal akreditasi B** | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | 2 | 2 | 12.130.740.000 | 2 | 12.458.080.000 | 2 | 12.776.420.000 | 2 | 13.053.760.000 | 2 | 13.362.100.000 |
| | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Didik yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 150 | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan | 2.165 | 2.165 | | 2.165 | | 2.165 | | 2.165 | | 2.165 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Sekolah Menengah Pertama (Orang) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | |
| | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 0 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 150 | 1.250 | | 1.300 | | 1.350 | | 1.400 | | 150 | |
| | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Dibangun (Ruang) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 15 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Ruang Unit Kesehatan | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |
| | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 75 | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | |
| **1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Sekolah Baru yang Terbangun** | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU** | | | | 205.000.000 | | 260.000.000 | | 265.000.000 | | 270.000.000 | | 285.000.000 |
| **Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun** | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | 1 | 205.000.000 | 1 | 260.000.000 | 1 | 265.000.000 | 1 | 270.000.000 | 1 | 285.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 81.000.000 | | 81.000.000 | | 82.000.000 |
| **Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun** | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 81.000.000 | 1 | 81.000.000 | 1 | 82.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 215.000.000 |
| **Perpustakaan Sekolah yang Terbangun** | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 215.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 215.000.000 |
| **Ruang Laboratorium yang Terbangun** | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 215.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 215.000.000 |
| **Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 0 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 215.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah** | | | | 1.900.000.000 | | 1.800.000.000 | | 1.700.000.000 | | 1.600.000.000 | | 1.500.000.000 |
| **Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 15 | 15 | 1.900.000.000 | 15 | 1.800.000.000 | 15 | 1.700.000.000 | 15 | 1.600.000.000 | 15 | 1.500.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 |
| **Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Perpustakaan Sekolah** | | | | | | | | | | | | |
| **Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium** | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 |
| **Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula** | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 |
| **Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) | 0 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | | | | 1.000.000.000 | | 900.000.000 | | 800.000.000 | | 700.000.000 | | 600.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 8 | 8 | 1.000.000.000 | 8 | 900.000.000 | 8 | 800.000.000 | 8 | 700.000.000 | 8 | 600.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah** | | | | 108.900.000 | | 118.800.000 | | 128.700.000 | | 138.600.000 | | 148.500.000 |
| **Mebel Sekolah yang Tersedia** | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | 2 | 2 | 108.900.000 | 2 | 118.800.000 | 2 | 128.700.000 | 2 | 138.600.000 | 2 | 148.500.000 |
| **1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah** | | | | 500.000.000 | | 525.000.000 | | 550.000.000 | | 575.000.000 | | 600.000.000 |
| **Perlengkapan Sekolah yang Tersedia** | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 0 | 10 | 500.000.000 | 10 | 525.000.000 | 10 | 550.000.000 | 10 | 575.000.000 | 10 | 600.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama** | | | | 1.859.000.000 | | 2.028.000.000 | | 2.197.000.000 | | 2.366.000.000 | | 2.535.000.000 |
| **Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik** | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 150 | 1.250 | 1.859.000.000 | 1.300 | 2.028.000.000 | 1.350 | 2.197.000.000 | 1.400 | 2.366.000.000 | 150 | 2.535.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan** | | | | 1.003.090.000 | | 1.094.280.000 | | 1.185.470.000 | | 1.276.660.000 | | 1.367.850.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | | | | | | | | | | |
| **Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 2.165 | 2.165 | 1.003.090.000 | 2.165 | 1.094.280.000 | 2.165 | 1.185.470.000 | 2.165 | 1.276.660.000 | 2.165 | 1.367.850.000 |
| **1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | | 200.000.000 | | 175.000.000 | | 150.000.000 | | 125.000.000 | | 100.000.000 |
| **Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan | 150 | 150 | 200.000.000 | 150 | 175.000.000 | 150 | 150.000.000 | 150 | 125.000.000 | 150 | 100.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Kompetensi dan Kualifikasi** | Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama** | | | | 30.250.000 | | 33.000.000 | | 35.750.000 | | 38.500.000 | | 41.250.000 |
| **Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik** | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 75 | 75 | 30.250.000 | 75 | 33.000.000 | 75 | 35.750.000 | 75 | 38.500.000 | 75 | 41.250.000 |
| **1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan** | | | | 181.500.000 | | 198.000.000 | | 214.500.000 | | 231.000.000 | | 247.500.000 |
| **Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan** | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | 1 | 181.500.000 | 1 | 198.000.000 | 1 | 214.500.000 | 1 | 231.000.000 | 1 | 247.500.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru** | | | | 500.000.000 | | 550.000.000 | | 600.000.000 | | 650.000.000 | | 700.000.000 |
| **Ruang Kelas Baru Bertambah** | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 0 | 2 | 500.000.000 | 2 | 550.000.000 | 2 | 600.000.000 | 2 | 650.000.000 | 2 | 700.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik** | | | | 363.000.000 | | 396.000.000 | | 429.000.000 | | 462.000.000 | | 495.000.000 |
| **Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia** | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 2.000 | 2.000 | 363.000.000 | 2.000 | 396.000.000 | 2.000 | 429.000.000 | 2.000 | 462.000.000 | 2.000 | 495.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 215.000.000 |
| **Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 215.000.000 |
| **1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik** | | | | 3.000.000.000 | | 3.100.000.000 | | 3.200.000.000 | | 3.300.000.000 | | 3.400.000.000 |
| **Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia** | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta | 20 | 20 | 3.000.000.000 | 20 | 3.100.000.000 | 20 | 3.200.000.000 | 20 | 3.300.000.000 | 20 | 3.400.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Didik yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | | | | 25.737.520.900 | | 28.074.022.800 | | 30.413.524.700 | | 32.753.026.600 | | 35.092.528.500 |
| **Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) | 1.954 | 1.954 | 4.059.910.000 | 1.954 | 4.425.720.000 | 1.954 | 4.794.530.000 | 1.954 | 5.163.340.000 | 1.954 | 5.532.150.000 |
| **1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD** | | | | 4.059.910.000 | | 4.425.720.000 | | 4.794.530.000 | | 5.163.340.000 | | 5.532.150.000 |
| **Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) | 1.954 | 1.954 | 4.059.910.000 | 1.954 | 4.425.720.000 | 1.954 | 4.794.530.000 | 1.954 | 5.163.340.000 | 1.954 | 5.532.150.000 |
| **proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B** | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | | | 21.677.610.900 | | 23.648.302.800 | | 25.618.994.700 | | 27.589.686.600 | | 29.560.378.500 |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Pendidikan (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) | 7 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 125 | 125 | | 125 | | 125 | | 125 | | 125 | |
| | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 1.083 | 1.083 | | 1.083 | | 1.083 | | 1.083 | | 1.083 | |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan | 150 | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) | 7 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |
| | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 24 | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | |
| | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 120 | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | |
| | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan | 1.038 | 1.038 | | 1.038 | | 1.038 | | 1.038 | | 1.038 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Dana BOP PAUD (Orang) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| **1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD** | | | | 1.100.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.500.000.000 |
| **Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) | 2 | 2 | 1.100.000.000 | 2 | 1.200.000.000 | 2 | 1.300.000.000 | 2 | 1.400.000.000 | 2 | 1.500.000.000 |
| **1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD** | | | | 127.050.000 | | 138.600.000 | | 150.150.000 | | 161.700.000 | | 173.250.000 |
| **Mebel PAUD yang Tersedia** | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) | 7 | 7 | 127.050.000 | 7 | 138.600.000 | 7 | 150.150.000 | 7 | 161.700.000 | 7 | 173.250.000 |
| **1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan** | | | | 42.350.000 | | 46.200.000 | | 50.050.000 | | 53.900.000 | | 57.750.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Perlengkapan PAUD** | | | | | | | | | | | | |
| **Perlengkapan PAUD yang Tersedia** | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) | 7 | 7 | 42.350.000 | 7 | 46.200.000 | 7 | 50.050.000 | 7 | 53.900.000 | 7 | 57.750.000 |
| **1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD** | | | | 469.396.400 | | 512.068.800 | | 554.741.200 | | 597.413.600 | | 640.086.000 |
| **Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 150 | 150 | 469.396.400 | 150 | 512.068.800 | 150 | 554.741.200 | 150 | 597.413.600 | 150 | 640.086.000 |
| **1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD** | | | | 189.062.500 | | 206.250.000 | | 223.437.500 | | 240.625.000 | | 257.812.500 |
| **Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD** | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 125 | 125 | 189.062.500 | 125 | 206.250.000 | 125 | 223.437.500 | 125 | 240.625.000 | 125 | 257.812.500 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD** | | | | 17.076.532.000 | | 18.628.944.000 | | 20.181.356.000 | | 21.733.768.000 | | 23.286.180.000 |
| **Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD** | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 1.083 | 1.083 | 17.076.532.000 | 1.083 | 18.628.944.000 | 1.083 | 20.181.356.000 | 1.083 | 21.733.768.000 | 1.083 | 23.286.180.000 |
| **1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD** | | | | 61.637.400 | | 67.240.800 | | 72.844.200 | | 78.447.600 | | 84.051.000 |
| **Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD** | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) | 1.038 | 1.038 | 61.637.400 | 1.038 | 67.240.800 | 1.038 | 72.844.200 | 1.038 | 78.447.600 | 1.038 | 84.051.000 |
| **1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan** | | | | 90.750.000 | | 99.000.000 | | 107.250.000 | | 115.500.000 | | 123.750.000 |
| **Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan** | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang | 1 | 1 | 90.750.000 | 1 | 99.000.000 | 1 | 107.250.000 | 1 | 115.500.000 | 1 | 123.750.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Pendidikan (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan** | | | | 90.750.000 | | 99.000.000 | | 107.250.000 | | 115.500.000 | | 123.750.000 |
| **Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan** | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 2 | 2 | 90.750.000 | 2 | 99.000.000 | 2 | 107.250.000 | 2 | 115.500.000 | 2 | 123.750.000 |
| **1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan** | | | | 90.750.000 | | 99.000.000 | | 107.250.000 | | 115.500.000 | | 123.750.000 |
| **Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan** | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 24 | 24 | 90.750.000 | 24 | 99.000.000 | 24 | 107.250.000 | 24 | 115.500.000 | 24 | 123.750.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Sekolah Baru yang Terbangun** | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik** | | | | 453.750.000 | | 495.000.000 | | 536.250.000 | | 577.500.000 | | 618.750.000 |
| **Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia** | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 3.000 | 3.000 | 453.750.000 | 3.000 | 495.000.000 | 3.000 | 536.250.000 | 3.000 | 577.500.000 | 3.000 | 618.750.000 |
| **1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD** | | | | 907.500.000 | | 990.000.000 | | 1.072.500.000 | | 1.155.000.000 | | 1.237.500.000 |
| **Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 5 | 5 | 907.500.000 | 5 | 990.000.000 | 5 | 1.072.500.000 | 5 | 1.155.000.000 | 5 | 1.237.500.000 |
| **1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD** | | | | 252.082.600 | | 274.999.200 | | 297.915.800 | | 320.832.400 | | 343.749.000 |
| **Terselenggaranya Proses Belajar PAUD** | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 120 | 120 | 252.082.600 | 120 | 274.999.200 | 120 | 297.915.800 | 120 | 320.832.400 | 120 | 343.749.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah** | | | | 726.000.000 | | 792.000.000 | | 858.000.000 | | 924.000.000 | | 990.000.000 |
| **Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 4 | 4 | 726.000.000 | 4 | 792.000.000 | 4 | 858.000.000 | 4 | 924.000.000 | 4 | 990.000.000 |
| **1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | 7.626.365.000 | | 8.210.580.000 | | 8.794.795.000 | | 9.379.010.000 | | 9.963.225.000 |
| **Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Pendidikan Non Formal/Kesetaraan** | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 27 | 27 | 4.279.165.000 | 27 | 4.668.180.000 | 27 | 5.057.195.000 | 27 | 5.446.210.000 | 27 | 5.835.225.000 |
| **1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan** | | | | 4.279.165.000 | | 4.668.180.000 | | 5.057.195.000 | | 5.446.210.000 | | 5.835.225.000 |
| **Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan** | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 27 | 27 | 4.279.165.000 | 27 | 4.668.180.000 | 27 | 5.057.195.000 | 27 | 5.446.210.000 | 27 | 5.835.225.000 |
| **proporsi jumlah satuan PNF yang mendapatkan minimal akreditasi B** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan | 7 | 7 | 3.347.200.000 | 7 | 3.542.400.000 | 7 | 3.737.600.000 | 7 | 3.932.800.000 | 7 | 4.128.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Pendidikan Nonformal/Keseteraan (Orang) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseteraan (Orang) | 27 | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | |
| | Jumlah Sekolah Nonformal/Keseteraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 27 | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | |
| | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) | 9,552 | 9,552 | | 9,552 | | 9,552 | | 9,552 | | 9,552 | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk | 29 | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Keseteraan** | | | | 127.050.000 | | 138.600.000 | | 150.150.000 | | 161.700.000 | | 173.250.000 |
| **Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Keseteraan** | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Keseteraan (Orang) | 7 | 7 | 127.050.000 | 7 | 138.600.000 | 7 | 150.150.000 | 7 | 161.700.000 | 7 | 173.250.000 |
| **1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keseteraan** | | | | 60.500.000 | | 66.000.000 | | 71.500.000 | | 77.000.000 | | 82.500.000 |
| **Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keseteraan** | Jumlah Sekolah Nonformal/Keseteraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 27 | 27 | 60.500.000 | 27 | 66.000.000 | 27 | 71.500.000 | 27 | 77.000.000 | 27 | 82.500.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan** | | | | 30.250.000 | | 33.000.000 | | 35.750.000 | | 38.500.000 | | 41.250.000 |
| **Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan** | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 27 | 27 | 30.250.000 | 27 | 33.000.000 | 27 | 35.750.000 | 27 | 38.500.000 | 27 | 41.250.000 |
| **1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan** | | | | 181.500.000 | | 198.000.000 | | 214.500.000 | | 231.000.000 | | 247.500.000 |
| **Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan** | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | 1 | 181.500.000 | 1 | 198.000.000 | 1 | 214.500.000 | 1 | 231.000.000 | 1 | 247.500.000 |
| **1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan** | | | | 199.650.000 | | 217.800.000 | | 235.950.000 | | 254.100.000 | | 272.250.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan** | | | | | | | | | | | | |
| **Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan** | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 2 | 2 | 199.650.000 | 2 | 217.800.000 | 2 | 235.950.000 | 2 | 254.100.000 | 2 | 272.250.000 |
| **1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU** | | | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 |
| **Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun** | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | 3 | 650.000.000 | 3 | 650.000.000 | 3 | 650.000.000 | 3 | 650.000.000 | 3 | 650.000.000 |
| **1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | | | | 544.500.000 | | 594.000.000 | | 643.500.000 | | 693.000.000 | | 742.500.000 |
| **Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 3 | 3 | 544.500.000 | 3 | 594.000.000 | 3 | 643.500.000 | 3 | 693.000.000 | 3 | 742.500.000 |
| **1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan,** | | | | 90.750.000 | | 99.000.000 | | 107.250.000 | | 115.500.000 | | 123.750.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan** | | | | | | | | | | | | |
| **Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan** | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 29 | 29 | 90.750.000 | 29 | 99.000.000 | 29 | 107.250.000 | 29 | 115.500.000 | 29 | 123.750.000 |
| **1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Sekolah Baru yang Terbangun** | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik** | | | | 1.100.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.300.000.000 |
| **Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik** | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) | 9,552 | 9,552 | 1.100.000.000 | 9,552 | 1.150.000.000 | 9,552 | 1.200.000.000 | 9,552 | 1.250.000.000 | 9,552 | 1.300.000.000 |
| **1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan** | | | | 363.000.000 | | 396.000.000 | | 429.000.000 | | 462.000.000 | | 495.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal** | | | | | | | | | | | | |
| **Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun** | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) | 2 | 2 | 363.000.000 | 2 | 396.000.000 | 2 | 429.000.000 | 2 | 462.000.000 | 2 | 495.000.000 |
| **1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | 50.000.000 | | 50.600.000 | | 51.400.000 | | 52.500.000 | | 53.800.000 |
| **Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan** | Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%) | 93,49 | 93,85 | 50.000.000 | 95,14 | 50.600.000 | 95,85 | 51.400.000 | 96,57 | 52.500.000 | 97,28 | 53.800.000 |
| **1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| **Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan kurikulum muatan lokal** | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 0 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) | 0 | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | |
| | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) | 0 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| **1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| **Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun** | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Tersusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| **Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia** | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) | 0 | 50 | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 |
| **1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| **Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya** | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) | 0 | 75 | 5.000.000 | 75 | 5.000.000 | 75 | 5.000.000 | 75 | 5.000.000 | 75 | 5.000.000 |
| **1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| **Tersusunnya model-model pembelajaran** | Jumlah model-model pembelajaran inovatif | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **inovatif Pendidikan Dasar** | Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| **Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |
| **1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | | | | 25.000.000 | | 25.600.000 | | 26.400.000 | | 27.500.000 | | 28.800.000 |
| **Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang melaksanakan kurikulum muatan lokal** | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku) | 0 | 50 | 25.000.000 | 50 | 25.600.000 | 50 | 26.400.000 | 50 | 27.500.000 | 50 | 28.800.000 |
| | Jumlah model-model pembelajaran | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| **1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| **Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan** | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Nonformal Tersusun** | Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| **Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia** | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku) | 0 | 50 | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 |
| **1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | | | | 13.000.000 | | 13.600.000 | | 14.400.000 | | 15.500.000 | | 16.800.000 |
| **Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen) | 2 | 1 | 13.000.000 | 1 | 13.600.000 | 1 | 14.400.000 | 1 | 15.500.000 | 1 | 16.800.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| **Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 0 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
| **1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | 150.000.000 | | 151.700.000 | | 154.000.000 | | 157.200.000 | | 160.900.000 |
| **Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan** | Indeks Distribusi Guru (Indeks) | 41.072.088 | 43.074.090 | 50.000.000 | 44.075.090 | 51.000.000 | 45.076.091 | 52.000.000 | 45.077.091 | 53.000.000 | 46.078.092 | 54.000.000 |
| | Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik (%) | 51,69 | 51,78 | | 51,83 | | 51,87 | | 51,92 | | 51,97 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | 150.000.000 | | 151.700.000 | | 154.000.000 | | 157.200.000 | | 160.900.000 |
| **Prosentase Distribusi Guru** | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 51.000.000 | 1 | 52.000.000 | 1 | 53.000.000 | 1 | 54.000.000 |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Nonformal/Keseteraan (Laporan) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseteraan** | | | | 50.000.000 | | 51.000.000 | | 52.000.000 | | 53.000.000 | | 54.000.000 |
| **Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseteraan** | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseteraan (Dokumen) | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 51.000.000 | 1 | 52.000.000 | 1 | 53.000.000 | 1 | 54.000.000 |
| **1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseteraan** | | | | | | | | | | | | |
| **Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseteraan** | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseteraan (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Meningkatnya pemenuhan dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan** | Persentase Satuan Pendidikan yang terpenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik (%) | 65,75 | 66,97 | 100.000.000 | 67,74 | 100.700.000 | 68,5 | 102.000.000 | 69,27 | 104.200.000 | 70,03 | 106.900.000 |
| **1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseteraan** | | | | 150.000.000 | | 151.700.000 | | 154.000.000 | | 157.200.000 | | 160.900.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Proporsi guru dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)** | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseteraan (Laporan) | 6 | 6 | 100.000.000 | 6 | 100.700.000 | 6 | 102.000.000 | 6 | 104.200.000 | 6 | 106.900.000 |
| **1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseteraan** | | | | 100.000.000 | | 100.700.000 | | 102.000.000 | | 104.200.000 | | 106.900.000 |
| **Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseteraan** | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan | 6 | 6 | 100.000.000 | 6 | 100.700.000 | 6 | 102.000.000 | 6 | 104.200.000 | 6 | 106.900.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Nonformal/Keseteraan (Laporan) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | | | | 102.000.000 | | 104.040.000 | | 105.120.800 | | 108.243.216 | | 110.408.080 |
| **Meningkatnya kepemilikan perizinan satuan pendidikan sesuai ketentuan** | Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/keseteraan yang memiliki perizinan yang berlaku (%) | 35,81 | 43,87 | 52.000.000 | 47,45 | 53.040.000 | 51,03 | 54.120.800 | 54,61 | 55.243.216 | 58,19 | 56.408.080 |
| | Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memiliki perizinan yang berlaku (%) | 38,78 | 54,08 | | 59,18 | | 64,29 | | 69,39 | | 79,59 | |
| **1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | | | | 52.000.000 | | 53.040.000 | | 54.120.800 | | 55.243.216 | | 56.408.080 |
| **Jumlah Perizinan Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang berlaku** | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggaraka | 0 | 2 | 52.000.000 | 2 | 53.040.000 | 2 | 54.120.800 | 2 | 55.243.216 | 2 | 56.408.080 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | n oleh Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 35 | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | |
| **1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| **Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan** | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian | 35 | 35 | 10.000.000 | 35 | 10.000.000 | 35 | 10.000.000 | 35 | 10.000.000 | 35 | 10.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi** | Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | | | | 22.000.000 | | 23.040.000 | | 24.120.800 | | 25.243.216 | | 26.408.080 |
| **Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 2 | 2 | 22.000.000 | 2 | 23.040.000 | 2 | 24.120.800 | 2 | 25.243.216 | 2 | 26.408.080 |
| **1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| **Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan** | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan | 0 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| **Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi Pendidikan** | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%) | 100 | 100 | 50.000.000 | 100 | 51.000.000 | 100 | 51.000.000 | 100 | 53.000.000 | 100 | 54.000.000 |
| **1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | | | | 50.000.000 | | 51.000.000 | | 51.000.000 | | 53.000.000 | | 54.000.000 |
| **Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Dikeluarkan** | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 0 | 35 | 50.000.000 | 36 | 51.000.000 | 37 | 51.000.000 | 38 | 53.000.000 | 39 | 54.000.000 |
| | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan | 0 | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| **Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi** | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 0 | 35 | 20.000.000 | 36 | 20.000.000 | 37 | 20.000.000 | 38 | 20.000.000 | 39 | 20.000.000 |
| **1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | | | | 30.000.000 | | 31.000.000 | | 31.000.000 | | 33.000.000 | | 34.000.000 |
| **Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang** | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan | 0 | 35 | 30.000.000 | 36 | 31.000.000 | 37 | 31.000.000 | 38 | 33.000.000 | 39 | 34.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Diselenggarakan oleh Masyarakat** | Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| **1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | | 100.000.000 | | 101.200.000 | | 102.800.000 | | 104.900.000 | | 107.400.000 |
| **Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah** | Persentase pengembangan bahasa dan sastra (%) | 65,36 | 68 | 100.000.000 | 69,33 | 101.200.000 | 70,67 | 102.800.000 | 72 | 104.900.000 | 71,9 | 107.400.000 |
| **1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | 100.000.000 | | 101.200.000 | | 102.800.000 | | 104.900.000 | | 107.400.000 |
| **Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah** | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen) | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 101.200.000 | 1 | 102.800.000 | 1 | 104.900.000 | 1 | 107.400.000 |
| | Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku) | 144 | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | |
| | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| **1.01.06.2.01.0002 - Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| **Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi** | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa) | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |
| **1.01.06.2.01.0007 - Penyusunan** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | |
| **Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun** | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen) | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 |
| **1.01.06.2.01.0008 - Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah** | | | | 80.000.000 | | 81.200.000 | | 82.800.000 | | 84.900.000 | | 87.400.000 |
| **Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah** | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku) | 144 | 144 | 80.000.000 | 144 | 81.200.000 | 144 | 82.800.000 | 144 | 84.900.000 | 144 | 87.400.000 |
| **1.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi media publik berbahasa daerah** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| **Media publik berbahasa daerah terfasilitasi** | Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media) | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |
| **2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | 1.420.000.000 | | 1.435.900.000 | | 1.457.500.000 | | 1.487.300.000 | | 1.522.300.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | 800.000.000 | | 807.500.000 | | 817.400.000 | | 833.200.000 | | 852.100.000 |
| **Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan** | Persentase Obyek Budaya yang dikembangkan (%) | 50 | 58 | 800.000.000 | 62 | 807.500.000 | 69 | 817.400.000 | 71 | 833.200.000 | 79 | 852.100.000 |
| **2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | 679.000.000 | | 674.400.000 | | 670.990.000 | | 672.149.000 | | 674.943.900 |
| **Jumlah objek kebudayaan yang dilestarikan** | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | 100 | 100 | 679.000.000 | 100 | 674.400.000 | 100 | 670.990.000 | 100 | 672.149.000 | 100 | 674.943.900 |
| | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| **2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan** | | | | 618.500.000 | | 607.850.000 | | 597.785.000 | | 591.623.500 | | 586.365.850 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan** | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | 5 | 5 | 618.500.000 | 5 | 607.850.000 | 5 | 597.785.000 | 5 | 591.623.500 | 5 | 586.365.850 |
| **2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan** | | | | 60.500.000 | | 66.550.000 | | 73.205.000 | | 80.525.500 | | 88.578.050 |
| **Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan** | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | 100 | 100 | 60.500.000 | 100 | 66.550.000 | 100 | 73.205.000 | 100 | 80.525.500 | 100 | 88.578.050 |
| **2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | 121.000.000 | | 133.100.000 | | 146.410.000 | | 161.051.000 | | 177.156.100 |
| **Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan** | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan | 4 | 4 | 121.000.000 | 4 | 133.100.000 | 4 | 146.410.000 | 4 | 161.051.000 | 4 | 177.156.100 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Pemanfaatan (Objek) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| **2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya** | | | | 60.500.000 | | 66.550.000 | | 73.205.000 | | 80.525.500 | | 88.578.050 |
| **Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya** | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) | 4 | 4 | 60.500.000 | 4 | 66.550.000 | 4 | 73.205.000 | 4 | 80.525.500 | 4 | 88.578.050 |
| **2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional** | | | | 60.500.000 | | 66.550.000 | | 73.205.000 | | 80.525.500 | | 88.578.050 |
| **Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan** | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan | 1 | 1 | 60.500.000 | 1 | 66.550.000 | 1 | 73.205.000 | 1 | 80.525.500 | 1 | 88.578.050 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Pranata Tradisional** | Pranata Tradisional (Laporan) | | | | | | | | | | | |
| **2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | | 500.000.000 | | 505.600.000 | | 513.200.000 | | 523.700.000 | | 536.000.000 |
| **Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional** | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%) | 33,33 | 37,5 | 500.000.000 | 40 | 505.600.000 | 40 | 513.200.000 | 45,45 | 523.700.000 | 45,45 | 536.000.000 |
| **2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | 500.000.000 | | 505.600.000 | | 513.200.000 | | 523.700.000 | | 536.000.000 |
| **Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina** | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 24 | 24 | 500.000.000 | 24 | 505.600.000 | 24 | 513.200.000 | 24 | 523.700.000 | 24 | 536.000.000 |
| | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional** | | | | 439.500.000 | | 439.050.000 | | 439.995.000 | | 443.174.500 | | 447.421.950 |
| **Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional** | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | 100 | 100 | 439.500.000 | 100 | 439.050.000 | 100 | 439.995.000 | 100 | 443.174.500 | 100 | 447.421.950 |
| **2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional** | | | | 60.500.000 | | 66.550.000 | | 73.205.000 | | 80.525.500 | | 88.578.050 |
| **Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional** | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 24 | 24 | 60.500.000 | 24 | 66.550.000 | 24 | 73.205.000 | 24 | 80.525.500 | 24 | 88.578.050 |
| **2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | 70.000.000 | | 70.800.000 | | 71.900.000 | | 73.400.000 | | 75.200.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan** | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase) | 28,57 | 33,33 | 70.000.000 | 33,33 | 70.800.000 | 38,1 | 71.900.000 | 38,1 | 73.400.000 | 42,86 | 75.200.000 |
| | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | 57,14 | 61,9 | | 66,67 | | 71,43 | | 76,19 | | 80,95 | |
| **2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | | | | 28.050.000 | | 30.855.000 | | 33.940.500 | | 37.334.550 | | 41.068.005 |
| **jumlah cagar budaya yang ditetapkan** | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) | 7 | 7 | 28.050.000 | 7 | 30.855.000 | 7 | 33.940.500 | 7 | 37.334.550 | 7 | 41.068.005 |
| | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | 7 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| **2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya** | | | | 11.000.000 | | 12.100.000 | | 13.310.000 | | 14.641.000 | | 16.105.100 |
| **Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya** | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) | 7 | 7 | 11.000.000 | 7 | 12.100.000 | 7 | 13.310.000 | 7 | 14.641.000 | 7 | 16.105.100 |
| **2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya** | | | | 17.050.000 | | 18.755.000 | | 20.630.500 | | 22.693.550 | | 24.962.905 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya** | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | 7 | 7 | 17.050.000 | 7 | 18.755.000 | 7 | 20.630.500 | 7 | 22.693.550 | 7 | 24.962.905 |
| **2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | | | | 41.950.000 | | 39.945.000 | | 37.959.500 | | 36.065.450 | | 34.131.995 |
| **Jumlah cagar budaya yang dikelola** | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) | 2 | 2 | 41.950.000 | 2 | 39.945.000 | 2 | 37.959.500 | 2 | 36.065.450 | 2 | 34.131.995 |
| | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| **2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya** | | | | 28.200.000 | | 24.820.000 | | 21.322.000 | | 17.764.200 | | 14.000.620 |
| **Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi** | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) | 5 | 5 | 28.200.000 | 5 | 24.820.000 | 5 | 21.322.000 | 5 | 17.764.200 | 5 | 14.000.620 |
| **2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya** | | | | 13.750.000 | | 15.125.000 | | 16.637.500 | | 18.301.250 | | 20.131.375 |
| **Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya** | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) | 2 | 2 | 13.750.000 | 2 | 15.125.000 | 2 | 16.637.500 | 2 | 18.301.250 | 2 | 20.131.375 |
| **2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | | 50.000.000 | | 52.000.000 | | 55.000.000 | | 57.000.000 | | 59.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Meningkatnya Tata Kelola Museum** | Persentase Koleksi Museum Yang Dihimpun (%) | 4 | 6 | 50.000.000 | 8 | 52.000.000 | 10 | 55.000.000 | 12 | 57.000.000 | 14 | 59.000.000 |
| **2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota** | | | | 50.000.000 | | 52.000.000 | | 55.000.000 | | 57.000.000 | | 59.000.000 |
| **Jumlah Koleksi Museum yang Dihimpun** | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit) | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 52.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 57.000.000 | 1 | 59.000.000 |
| | Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang) | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang) | | | | | | | | | | | |
| **2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| **Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu** | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit) | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |
| **2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman** | | | | | | | | | | | | |
| **Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman** | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum** | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| **Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum** | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 |
| **2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi** | | | | 30.000.000 | | 32.000.000 | | 35.000.000 | | 37.000.000 | | 39.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| **Sarana dan Prasarana Museum** | | | | | | | | | | | | |
| **Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum** | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit) | 0 | 1 | 30.000.000 | 1 | 32.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 37.000.000 | 1 | 39.000.000 |
| **2.22.06.2.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum** | Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **2.22.06.2.01.0014 - Pengelolaan Operasional Museum** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| **Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum** | Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan) | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |
| **2.22.06.2.01.0015 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum** | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

## 4.3 Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo menempatkan sejumlah sub kegiatan prioritas yang diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029. sub kegiatan tersebut terbagi dalam dua bidang, yakni pendidikan dan kebudayaan, dengan pendekatan holistik yang mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus pelestarian identitas budaya lokal. Dalam bidang pendidikan, arah kebijakan dan program difokuskan melalui payung besar program “SAE Pendidikan” yang mencakup berbagai inisiatif strategis untuk menjamin akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.

Salah satu inisiatif unggulan adalah program Rehab 1.000 Sekolah, yang berfokus pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, termasuk ruang kelas, laboratorium, ruang guru, dan fasilitas sanitasi yang layak dan ramah anak. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, tetapi juga merupakan bentuk dukungan nyata terhadap Program Strategis Nasional 4 dalam hal revitalisasi pendidikan dasar dan menengah. Sejalan dengan upaya peningkatan akses pendidikan, Pemerintah Daerah juga meluncurkan program 10.000 Beasiswa Sampai Sarjana, yang mencakup beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu, beasiswa Tahfidz, beasiswa bagi guru PAUD, serta bantuan perlengkapan belajar untuk siswa SD dan SMP. Program ini secara langsung mendukung Program Strategis Nasional 1, khususnya dalam konteks penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga terus memperluas akses pendidikan anak usia dini dengan membangun serta merehabilitasi satuan PAUD, melengkapi fasilitas dan tenaga pendidik, dan memperkuat layanan holistik integratif. Intervensi ini merupakan bagian integral dari PSN 4, terutama pada aspek pembangunan dan revitalisasi PAUD. Selain itu, digitalisasi sekolah mulai diakselerasi melalui penyediaan alat praktik digital, laboratorium teknologi, dan integrasi sistem pembelajaran berbasis TIK. Hal ini tidak hanya bertujuan memperkuat literasi digital peserta didik, tetapi juga menjadi bagian dari agenda nasional dalam PSN 4 – Digitalisasi Sekolah. Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mulai diperkenalkan secara bertahap, dengan

menyediakan makanan sehat dan bergizi di beberapa satuan pendidikan sebagai bentuk upaya meningkatkan konsentrasi belajar dan menurunkan angka stunting.

Untuk menjawab tantangan ketimpangan distribusi guru, program ASN Nyaman Bekerja diluncurkan sebagai pendekatan strategis dalam mengatur penempatan guru sesuai kebutuhan wilayah dan memberikan insentif bagi guru di daerah khusus. Di sisi lain, kualitas pembelajaran juga diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan bagi guru, pendampingan guru dalam menghadapi persoalan psikososial dan kesehatan, serta peningkatan literasi dan numerasi peserta didik secara sistemik. Dalam mendukung upaya penanggulangan anak tidak sekolah (ATS), Dinas Dikdaya menjalankan Program Sekolah Rakyat yang berbasis pada pendekatan pendidikan nonformal dan kesetaraan, dengan fokus pada penjangkauan, motivasi belajar, serta pendampingan intensif. Inisiatif ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Strategis Nasional 1, yang menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama pemutus rantai kemiskinan.

Penguatan daya saing dan wawasan global juga menjadi perhatian melalui pengembangan International Class Program (ICP) di jenjang SMP dengan implementasi kurikulum Cambridge dan kerja sama internasional. Inovasi pembelajaran juga terus diperkuat melalui pendirian Science Center Probolinggo Creative Center (PCC) sebagai pusat riset, kreativitas, dan penguatan literasi sains yang melibatkan perguruan tinggi serta mitra industri. Sementara itu, pembangunan karakter peserta didik diperkuat melalui pembiasaan kegiatan keagamaan setiap pagi sesuai agama masing-masing, pembacaan kitab suci, dan pembentukan ekosistem sekolah yang religius dan berkarakter.

Dalam bidang kebudayaan, sub kegiatan prioritas diarahkan untuk memperkuat seni, tradisi, dan warisan budaya daerah. Melalui Program GUS WARIS (Gugus Penguatan Seni dan Budaya serta Warisan Adat), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pembentukan sanggar seni budaya di setiap kecamatan sebagai upaya regenerasi dan pelestarian seni tradisional. Perlindungan terhadap kebudayaan lokal juga diperkuat dengan pelestarian objek budaya masyarakat Tengger, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan kesenian, seperti Even Seni Budaya 7 Lake dan kegiatan budaya rutin di Gedung Kesenian Kabupaten Probolinggo. Pendekatan kebudayaan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ekspresi dan identitas lokal, tetapi juga sebagai media penguatan karakter dan kebanggaan daerah di tengah arus globalisasi.

Sub kegiatan prioritas yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi dengan Program Strategis Nasional. Integrasi ini diharapkan mampu mewujudkan generasi Kabupaten Probolinggo yang cerdas, sehat, religius, berkarakter, dan memiliki kebanggaan serta kepedulian terhadap budaya lokal sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tantangan masa depan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas merupakan serangkaian program terpilih yang dianggap paling penting dan mendesak untuk dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Program prioritas mengacu pada Prioritas Nasional sampai janji politik Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2025-2029 yang telah dilakukan penyelarasan antara Tujuan dan Sasaran RPJMD. Pelaksanaan program prioritas diharapkan mampu mencapai tujuan Pembangunan yang lebih terarah dan efektif.

**1. Program SAE Sekolah**

a. Sub Program/kerja Prioritas :Rekrutmen 1.000 Tenaga Pendidik Baru

Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar profesional di Kabupaten Probolinggo melalui kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi. Program ini akan merekrut dan melatih 1.000 lulusan yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan, termasuk di wilayah terpencil. Melalui kemitraan dengan kampus, program ini akan memastikan proses seleksi, pelatihan, dan penempatan tenaga pendidik yang berkualitas dan siap mengabdi di masyarakat. Dengan 1.000 Tenaga Pendidik Baru, diharapkan tercipta peningkatan kualitas pengajaran dan akses pendidikan yang lebih merata di Kabupaten Probolinggo.

Tahun Pelaksanaan: Direncanakan mulai pada tahun pertama (2025) dan dilanjutkan secara bertahap sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

b. Sub Program/kerja Prioritas :Rehab 1.000 Sekolah

Memperbaiki kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Probolinggo dengan melakukan rehabilitasi terhadap 1.000 sekolah yang mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat. Program ini

akan mencakup perbaikan ruang kelas, fasilitas belajar, dan sarana pendukung lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Dengan adanya Rehab 1.000 Sekolah, diharapkan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui fasilitas yang layak, sehingga mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif dan memberikan motivasi belajar bagi siswa serta tenaga pengajar di Kabupaten Probolinggo.

Tahun Pelaksanaan: Dimulai tahun pertama (2025) secara bertahap, dengan target tahunan hingga mencapai 1.000 unit sekolah.

c. Sub Program/kerja Prioritas :10.000 Beasiswa Sampai Sarjana

Untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah dan kekurangan tenaga pengajar profesional di Kabupaten Probolinggo. Program ini akan memberikan beasiswa pendidikan hingga jenjang sarjana bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang putus sekolah, agar memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan dan meraih gelar sarjana. Selain itu, program ini juga berfokus pada pembinaan calon tenaga pengajar yang kompeten melalui pendidikan tinggi, guna memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah, terutama yang mengalami kerusakan dan kekurangan fasilitas. Dengan adanya 10.000 Beasiswa Sampai Sarjana, diharapkan peningkatan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Probolinggo dapat terwujud, sehingga berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan daerah

Tahun Pelaksanaan: Dimulai pada tahun pertama (2025), dengan penambahan kuota secara bertahap setiap tahun hingga mencapai total 10.000 beasiswa pada akhir Renstra (2029).

d. Sub Program/kerja Prioritas :Sekolah Rakyat (SR)

Program Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama gratis yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan melalui Pendidikan

e. Sub Program/kerja Prioritas : Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi, kesehatan, dan

produktivitas masyarakat, terutama bagi mereka yang berisiko mengalami masalah gizi seperti stunting

2. **Program SAE Kerja**

   Sub Program/kerja Prioritas : Guru Nyaman Bekerja

   Memastikan bahwa setiap sekolah di wilayah Kabupaten mendapatkan jumlah guru yang sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan zonasi tempat tinggal dan kualifikasi (Distribusi Guru Proporsional). Mengatasi ketimpangan jumlah dan kualitas guru di berbagai sekolah. Pemerataan layanan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas

   Tahun Pelaksanaan: Dimulai tahun pertama (2025) dan dievaluasi setiap tahun.

3. **Program Strategis Nasional 1 Pengentasan Kemiskinan (Penanggulangan Kemiskinan, Sekolah Rakyat)**

   Tahun Pelaksanaan: Dimulai tahun pertama (2025), menyasar daerah dengan angka ATS tertinggi terlebih dahulu.

4. **Program Strategis Nasional 4 Perluasan Akses Pendidikan (Pembangunan dan Revitalisasi PAUD, Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah, Digitalisasi Sekolah, Makan Bergizi Gratis)**

   Tahun Pelaksanaan: Dimulai pada tahun pertama (2025).

5. **Program SAE Seni Budaya**

   Sub Program/Kegiatan Prioritas : Gus Waris – Gugus Penguatan Seni dan Budaya serta warisan adat

   Gugus ini akan menjadi wadah untuk melestarikan dan mengembangkan seni, budaya, dan tradisi lokal melalui pelatihan, festival, dan pameran. Program ini melibatkan komunitas adat dan seniman untuk menjaga warisan budaya serta mempromosikannya di tingkat nasional dan internasional, sekaligus menginspirasi kreativitas generasi muda.

   Tahun Pelaksanaan: Dimulai tahun pertama (2025) untuk penguatan identitas budaya lokal.

6. **Program Sae Seni Budaya – Kesenian Tradisional**

   Sub Program/Kegiatan Prioritas : 100 Event Wisata

   Meningkatkan daya tarik pariwisata Kabupaten Probolinggo dengan menyelenggarakan 100 acara wisata yang beragam di berbagai destinasi

sepanjang tahun. Program ini akan melibatkan komunitas lokal, desa wisata, dan pelaku ekonomi kreatif dalam merancang event yang mencakup festival budaya, kegiatan olahraga, kuliner lokal, dan pameran seni. Setiap event dirancang untuk menarik wisatawan, memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi lokal, serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan dukungan promosi terkoordinasi dan fasilitas yang memadai, 100 Event Wisata diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperpanjang lama tinggal mereka, serta memperkuat citra Kabupaten Probolinggo sebagai destinasi wisata yang dinamis dan beragam

Tahun Pelaksanaan: Diluncurkan tahun pertama (2025).

Adapun daftar subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.8

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| **1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | | | | |
| **1.** | 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | 1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ***SAE SEKOLAH*** Rekrutmen 1.000 Tenaga Pendidik Baru |
| **2.** | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah pada layanan pendidikan PAUD, dasar, dan nonformal | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | ***PN 4-Perluasan Akses Pendidikan*** Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah |
| | | | 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | ***PSN 4-Perluasan Akses Pendidikan*** Digitalisasi Sekolah |
| | | | 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi | ***SAE SEKOLAH*** Rekrutmen 1.000 Tenaga Pendidik Baru |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | ***SAE KERJA*** Guru Nyaman Bekerja |
| | | | 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | ***PN 4-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah*** Koordinasi penanganan ATS |
| | | | 1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | ***SAE SEKOLAH*** Koordinasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) |
| | | | 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | ***PN 4-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah*** penanganan ATS |
| | | | 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru | ***PSN 4-Perluasan Akses Pendidikan*** Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah |
| | | | 1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | ***SAE SEKOLAH*** Rehab 1.000 Sekolah |
| | | | 1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | ***SAE SEKOLAH*** Koordinasi Sekolah Rakyat (SR) |
| | | | 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | ***SAE SEKOLAH*** Rehab 1.000 Sekolah |
| | | | 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | ***PSN 4-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah*** penanganan ATS ***SAE SEKOLAH*** 10.000 Beasiswa Sampai Sarjana |
| | | | 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | ***PSN 4-Perluasan Akses Pendidikan*** Digitalisasi Sekolah |
| | | | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | ***PSN 4-Perluasan Akses Pendidikan*** Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | ***SAE SEKOLAH*** Rehab 1.000 Sekolah |
| | | | 1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | ***SAE SEKOLAH*** Rehab 1.000 Sekolah |
| | | | 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | ***PSN 4-Perluasan Akses Pendidikan*** Digitalisasi Sekolah |
| | | | 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | ***PN 4-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah***penanganan ATS***SAE SEKOLAH***10.000 Beasiswa Sampai Sarjana |
| | | | 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ***SAE SEKOLAH*** Rekrutmen 1.000 Tenaga Pendidik Baru ***SAE KERJA*** Guru Nyaman Bekerja |
| | | | 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | ***PN 4-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah*** Koordinasi penanganan ATS |
| | | | 1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | ***SAE SEKOLAH*** Koordinasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) |
| | | | 1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | ***SAE SEKOLAH*** Koordinasi Sekolah Rakyat (SR) |
| | | | 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru | ***PSN 4-Perluasan Akses Pendidikan*** Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah |
| | | | 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | ***PN 4-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah*** penanganan ATS |
| | | | 1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | ***PSN 4-Perluasan Akses Pendidikan*** Digitalisasi Sekolah |
| | | | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | **PN 4- Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini** |
| | | | 1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD | **PN 4- Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini** |
| | | | 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | **PN 4- Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini**<br>***SAE SEKOLAH***<br>Rekrutmen 1.000 Tenaga Pendidik Baru<br>***SAE KERJA***<br>Guru Nyaman Bekerja |
| | | | 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | **PN 4- Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini** |
| | | | 1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | **PN 4- Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini**<br>*SAE SEKOLAH*<br>**Koordinasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)** |
| | | | 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | ***PSN 4-Perluasan Akses Pendidikan***<br>Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah |
| | | | 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | |
| | | | 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | **PN 4- Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini**<br>**SAE SEKOLAH**<br>Rehab 1.000 Sekolah |
| | | | 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | **PN 4- Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini**<br>**SAE SEKOLAH**<br>Rehab 1.000 Sekolah |
| | | | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi | ***PN 4-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah***<br>penanganan ATS |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | Layanan di Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | **PSN 4- Makanan Bergizi Gratis** *SAE SEKOLAH* **Koordinasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)** |
| | | | 1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | ***SAE SEKOLAH***Rehab 1.000 Sekolah |
| | | | 1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | ***PSN 4-Perluasan Akses Pendidikan*** Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah |
| | | | 1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | ***PSN 4-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah*** penanganan ATS |
| | | | 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Forma | |
| **3.** | 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | Meningkatnya pemenuhan dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan | 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | 1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ***SAE KERJA*** Guru Nyaman Bekerja |
| | | Meningkatnya pemenuhan dan distribusi pendidik serta | 1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga | ***SAE KERJA*** Guru Nyaman Bekerja |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan Pendidikan | Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| **4.** | 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan | 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | ***PN8- Penguatan karakter dan jati diri bangsa*** ***SAE SENI BUDAYA*** Gus Waris: Gugus Penguatan Seni Dan Budaya Serta Warisan Adat ***SAE WISATA*** |
| **5.** | 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional | 2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | ***PN8- Penguatan karakter dan jati diri bangsa*** ***SAE SENI BUDAYA*** Gus Waris: Gugus Penguatan Seni Dan Budaya Serta Warisan Adat ***SAE WISATA*** |

Tabel 4.9

Indikator Kinerja Utama

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **1.** | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | |
| **2.** | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,64 | 12,88 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | |
| **3.** | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 6,31 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8 | |
| **4.** | Indeks Pembunganan Kebudayaan (IPK) Daerah | % | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | |
| **5.** | Persentase Obyek Kebudayaan yang dilestarikan | % | 59,38 | 59,5 | 60 | 61 | 62 | 63,5 | 65 | |
| **6.** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun | % | 90,56 | 93,12 | 95,97 | 98,21 | 100 | 100 | 100 | |
| **7.** | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun | % | 97,33 | 97,55 | 97,77 | 97,98 | 98,2 | 98,42 | 98,63 | |
| **8.** | Nilai Pemantauan dan Evaluasi PPKD | Nilai | 0 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | |
| **9.** | Prosentase Anak Tidak Sekolah (ATS) | % | 3,9 | 3,59 | 3,43 | 3,27 | 3,11 | 2,96 | 2,8 | |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis, potensi daerah, serta permasalahan aktual yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, sekaligus menjadi alat kendali dalam pelaksanaan program secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan daerah.

## 5.1 Kesimpulan Substansial

Pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Probolinggo adalah bagian tak terpisahkan dari upaya bersama untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan masyarakat yang berkarakter. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kualitas belajar mengajar, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan merata dalam kesempatan pendidikan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan harus berbasis data yang akurat dan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk identifikasi kesenjangan akses dan mutu layanan. Perencanaan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur, seperti satuan pendidikan, orang tua, komunitas budaya, dan masyarakat, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan ke depan akan difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran secara merata, pemerataan akses pendidikan PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan, penguatan kompetensi tenaga pendidik, pemajuan kebudayaan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam layanan pendidikan dan kebudayaan.
3. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor—baik dengan perangkat daerah lain, dunia usaha, maupun masyarakat—menjadi faktor kunci keberhasilan. Sinergi ini akan memperkuat efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa layanan pendidikan dan pemajuan kebudayaan benar-benar menjangkau dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo menetapkan sejumlah kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman utama agar setiap program berjalan secara terarah, akuntabel, dan berorientasi hasil, selaras dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029.

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui sistem pelaporan dan evaluasi yang terukur.
2. Partisipatif: Penyelenggaraan program dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan dan layanan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
3. Efisiensi dan Efektivitas: Penggunaan sumber daya dioptimalkan agar menghasilkan dampak yang maksimal terhadap peningkatan mutu, akses layanan, dan pemerataan hasil belajar.
4. Keadilan Sosial: Pembangunan dilaksanakan secara inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan kelompok rentan seperti anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah terpencil.
5. Berkelanjutan: Seluruh program dirancang dengan pendekatan jangka panjang yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan belajar, pengembangan SDM, serta daya dukung sistem dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.

## 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan Renstra ini untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai tujuan. Mekanisme yang diterapkan antara lain:

1. Monitoring Berkala: Dilaksanakan secara rutin untuk menilai kemajuan pelaksanaan program dari sisi fisik, keuangan, maupun ketercapaian sasaran, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan cepat jika ditemukan kendala.

2. Evaluasi Kinerja Tahunan: Dilakukan setiap akhir tahun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja, mengevaluasi efektivitas strategi, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya.
3. Pelibatan Masyarakat: Melalui forum musyawarah, survei kepuasan layanan, dan kanal pengaduan publik, masyarakat dilibatkan untuk memberikan umpan balik atas implementasi kebijakan.
4. Audit Internal dan Eksternal: Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah maupun lembaga pemeriksa lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas anggaran.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Keberhasilan implementasi Renstra ini memerlukan komitmen, kerja keras, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan, dengan berpedoman pada dokumen ini, cita-cita untuk mewujudkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas serta ekosistem kebudayaan yang maju dan lestari dapat tercapai, sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan **Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing).**

Probolinggo, September 2025

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**Drs. DWIJOKO NURJAYADI, MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 19690724 198903 1 004

PRASAJA NGESTI WIBAWA

# RENCANA STRATEGIS

## TAHUN 2025 - 2029

## DINAS KESEHATAN
## KABUPATEN PROBOLINGGO

dinkes.probolinggokab.go.id

# RENCANA STRATEGIS
# DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO
# TAHUN 2025 – 2029

**DINAS KESEHATAN**

**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Bapelitbangda dan pemangku kepentingan terkait.

Harapan kami adalah pembangunan kesehatan menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Probolinggo dan mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama untuk membenahi dan menyejahterakan warga Kabupaten Probolinggo secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas Insya Allah kita dapat wujudkan cita-cita dan realisasikan visi – misi.

Akhir kata kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga sumbangan pemikiran dapat bermanfaat dan memberikan kemajuan dalam pembangunan di bidang kesehatan Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 26 September 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**dr. HARIAWAN DWI TAMTOMO, M.M.Kes**
Pembina Tingkat I
NIP. 19710422 200212 1 002

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**DAFTAR ISI** ..... **ii**
**DAFTAR TABEL** ..... **iii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **v**
**BAB 1 PENDAHULUAN** ..... **2**
1.1 Latar Belakang ..... 2
1.2 Landasan Hukum ..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 6
1.4 Sistematika Penulisan ..... 7
**BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN** ..... **9**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan ..... 9
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan ..... 22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan ..... 41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD ..... 60
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD ..... 60
2.6 Penentuan Isu-isu Strategis ..... 63
**BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... **75**
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD ..... 75
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan ..... 85
**BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN** ..... **88**
4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif ..... 88
4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 423
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan ..... 432
4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..... 433
**BAB 5 PENUTUP** ..... **436**

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Sebaran Puskesmas berdasarkan Jenis, Jumlah Penduduk, dan Waktu Tempuh Desa/Kelurahan Terjauh di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 .... 24
Tabel 2.2 Sebaran Unit Pelayanan Kesehatan Desa beserta Jumlah Tenaga Kesehatan Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 ..... 25
Tabel 2.3 Jumlah Puskesmas Keliling dan Ambulans beserta Kondisinya ..... 26
Tabel 2.4 Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 ..... 27
Tabel 2.5 Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten Probolinggo ..... 28
Tabel 2.6 Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Rumah Sakit di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 ..... 29
Tabel 2.7 Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan ..... 30
Tabel 2.8 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 ..... 34
Tabel 2.9 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 ..... 35
Tabel 2.10 Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 ..... 36
Tabel 2.11 Jumlah Aset Tetap Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Periode sampai 31 Desember 2024 ..... 39
Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.... 42
Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo ..... 59
Tabel 2.14 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan ..... 61
Tabel 2.15 Cascading Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029 beserta Indikator dan Targetnya ..... 65
Tabel 2.16 Isu Strategis Dinas Kesehatan ..... 73
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ..... 75
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ..... 76
Tabel 3.3 Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama (Tujuan dan Sasaran) ..... 83
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan ..... 86
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan ..... 86
Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kesehatan ..... 89
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan..... 103
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 423
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan ..... 433

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan ..... 433

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo ..... 9
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Waluyojati ..... 17
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Tongas ..... 19
Gambar 2.4 Susunan Organisasi UPT PUSKESMAS ..... 21
Gambar 2.5 Struktur Organisasi UPT LABKESDA ..... 22
Gambar 2.6 Sebaran Lokasi Rumah Sakit di Kabupaten Probolinggo ..... 28
Gambar 2.7 Strata Posyandu di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 ..... 31
Gambar 2.8 Posyandu Aktif Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 ..... 33
Gambar 2.9 Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 ..... 37
Gambar 2.10 Grafik Kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo ..... 47
Gambar 2.11 Penyebab Kematian Neonatal (0-28 HARI) Tahun 2024 ..... 47
Gambar 2.12 Tren Kematian Ibu Maternal di Kabupaten Probolinggo ..... 49
Gambar 2.13 Penyebab Langsung Kematian Ibu di Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 – 2024 ..... 50
Gambar 2.14 Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1, K4, dan K6) di Kabupaten Probolinggo .... 52
Gambar 2.15 Persentase Cakupan Persalinan di Fasyankes di Kabupaten Probolinggo .... 54
Gambar 2.16 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di Kabupaten Probolinggo ..... 55

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 2025

## II. DINAS KESEHATAN

# BAB 1
# PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan mendukung pencapaian Misi ke-3, yaitu Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar lainnya yang Terjangkau (SAE Pendidikan dan Kesehatan) dan Tujuan Pembangunan Daerah ke-3, yaitu Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesejahteraan.

Renstra Dinas Kesehatan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Kesehatan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Kesehatan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Kesehatan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kesehatan.

Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029, Renstra

Kementerian Kesehatan Tahun 2025 – 2029, dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029, serta Dokumen KLHS Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo 2025 – 2029 didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029. Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu (a) perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; (c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Lebih lanjut Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo merupakan acuan penyusunan dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo periode tahun 2025 – 2029.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 nomor 194), Tambahan Lembaran Negara nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1039);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo 2010-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029;
25. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat

Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo;

27. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo;
28. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menyediakan rancangan dokumen rencana Pembangunan lima tahun urusan Kesehatan, yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Probolinggo urusan Kesehatan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mendukung Visi dan Misi pemeritah Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perubahan Dinas Kesehatan.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kesehatan, sumber daya, evaluasi kinerja pelayanan, permasalahan, serta isu strategis berdasarkan hasil telaah kebijakan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
2.6 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo beserta indikator kinerjanya. Selain itu juga dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun mendatang.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Selain itu juga dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo.

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan;

4.4 Target kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**BAB V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

# BAB 2
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sebagaimana Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

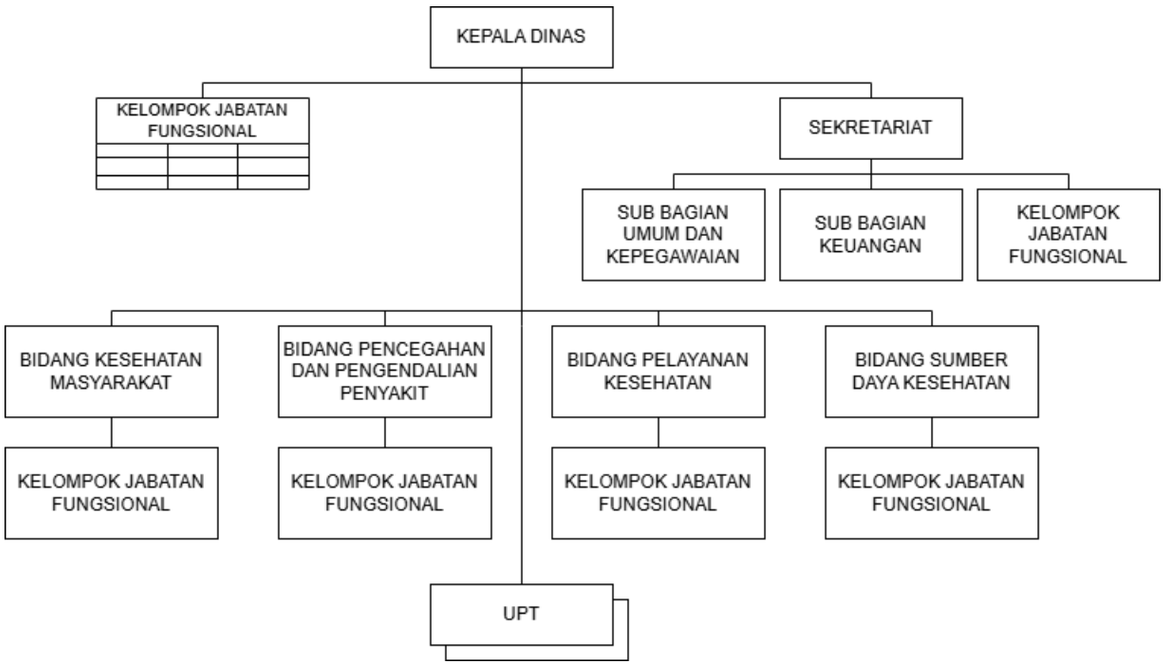


**Gambar 2.1**
**Struktur Organisasi**
**Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan pada pasal 73 bahwa Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Keuangan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Kesehatan masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional Unit
8. UPT

**A. Kepala Dinas Kesehatan**

Kepala Dinas Kesehatan mempuyai tugas membantu Bupati melaksanankan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya Kesehatan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya Kesehatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya Kesehatan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pembinaan terhadap Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**B. Sekretariat Dinas Kesehatan**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, Evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan Laporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem pengendalian Intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;

e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah/negara, kearsipan dan dokumentasi;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, Koordinasi dan Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

   a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
   b. pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
   c. penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
   d. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan Peningkatan sumber daya manusia;
   e. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
   f. penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
   g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Keuangan

   Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

   a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
   b. pengelolaan administrasi keuangan;
   c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   d. penyiapan bahan verifikasi dan pembukuan;

e. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:

a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran/data dan informasi kesehatan serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran/data dan informasi kesehatan serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/ kegiatan/anggaran data dan informasi kesehatan serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**C. Bidang Kesehatan Masyarakat**

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
b. penyusunan rencana kegiatan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
d. pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga;
e. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasinal Prosedur (SOP) kegiatan bidang;

f. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**D. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan, pelaksanan, pemantauan dan Evaluasi kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
b. penyusunan rencana kegiatan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
d. pelaksanaan kegiatan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
e. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasinal Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
g. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**E. Bidang Pelayanan Kesehatan**

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan, pelaksanan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional,

pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan jaminan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu Jaminan Kesehatan;
b. penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan jaminan Kesehatan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan jaminan Kesehatan;
d. pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan jaminan Kesehatan;
e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pengelolaan program pelayanan kesehatan rujukan;
f. pelaksanaan perjanjian kerjasama program layanan kesehatan rujukan;
g. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan jaminan Kesehatan;
h. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasinal Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
i. pegendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan jaminan Kesehatan;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**F. Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan, pelaksanan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
b. penyusunan rencana kegiatan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumberdaya manusia kesehatan;
d. pelaksanaan kegiatan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumberdaya manusia kesehatan;
e. penyiapan bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi pengembangan pelayanan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumberdaya manusia kesehatan;
f. pembinaan dan koordinasi pelaksaaan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumberdaya manusia kesehatan;
g. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasinal Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
h. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumberdaya manusia kesehatan;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## G. Unit Pelayanan Teknis

1. Unit Organisasi Bersifat Khusus

   Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, disebutkan bahwa Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut UOBK RSUD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang bersifat khusus melaksanakan kegiatan teknis operasional serta pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan sumber daya manusia. UOBK RSUD pada Dinas Kesehatan terdiri dari RSUD Waluyo Jati dan RSUD Tongas.

   a. RSUD Waluyo Jati

      RSUD Waluyo Jati merupakan Rumah Sakit Umum Kelas B yang dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta sumberdaya manusia. Susunan Organisasi RSUD Waluyo Jati terdiri dari:

      1) Kepala Dinas;
      2) Direktur;
      3) Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan, membawahi:
         a) Bidang Pelayanan Medik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

b) Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
c) Bidang Pelayanan Penunjang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

4) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
   a) Bagian Umum membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   b) Bagian Keuangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   c) Bagian Perencanaan, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5) Kelompok Staf Medik;
6) Kelompok Jabatan Fungsional
7) Komite-Komite;
8) Satuan Pengawas Internal;
9) IT – SIMRS;
10) Instalasi.

Direktur RSUD Waluyo Jati mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoodinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan pelayanan Kesehatan di rumah sakit. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur RSUD Waluyo Jati mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan strategis, operasional dan teknis di bidang pelayanan Kesehatan rumah sakit;
2) Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3) Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahunan;
4) Pelaksanaan Koordinasi tugas dan fungsi unsur organisasi;
5) Pengoordinasian pelayanan Kesehatan dengan institusi lain;
6) Pembinaan Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta inovasi;
7) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
8) Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi pelayanan Kesehatan;
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

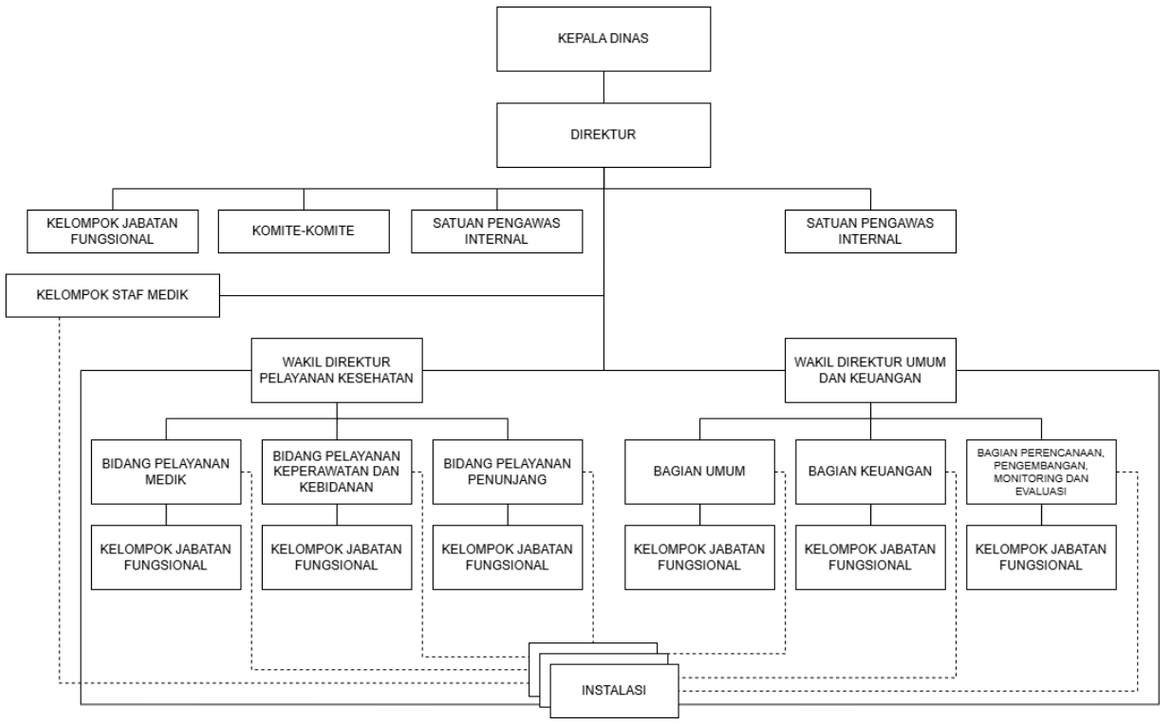


**Gambar 2.2**
**Struktur Organisasi**
**Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Waluyojati**

b. RSUD Tongas

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, RSUD Tongas merupakan Rumah Sakit Umum Kelas C yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan Organisasi RSUD Tongas terdiri dari:

1) Kepala Dinas;
2) Direktur;
3) Kepala Bagian Umum, membawahi:
    a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    b) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    c) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;

4) Kepala Bidang Pelayanan, membawahi:
    a) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
    b) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
5) Kepala Bidang Penunjang, membawahi:
    a) Kepala Seksi Penunjang Medik;

b) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.

6) Kelompok Jabatan Fungsional;
7) Kelompok Staf Medik;
8) Instalasi;
9) Komite-Komite; dan
10) Satuan Pengawas Internal.

Direktur RSUD Tongas mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pembinaan dan mengendalikan penyelenggaraan rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur RSUD Tongas mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
2) Perumusan kebijakan strategis, operasional dan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
3) Pengoordinasian pelayanan kesehatan dengan institusi lain;
4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelayanan kesehatan;
7) Pelaporan kepada Kepala Dinas yang meliputi laporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta sumber daya manusia;
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

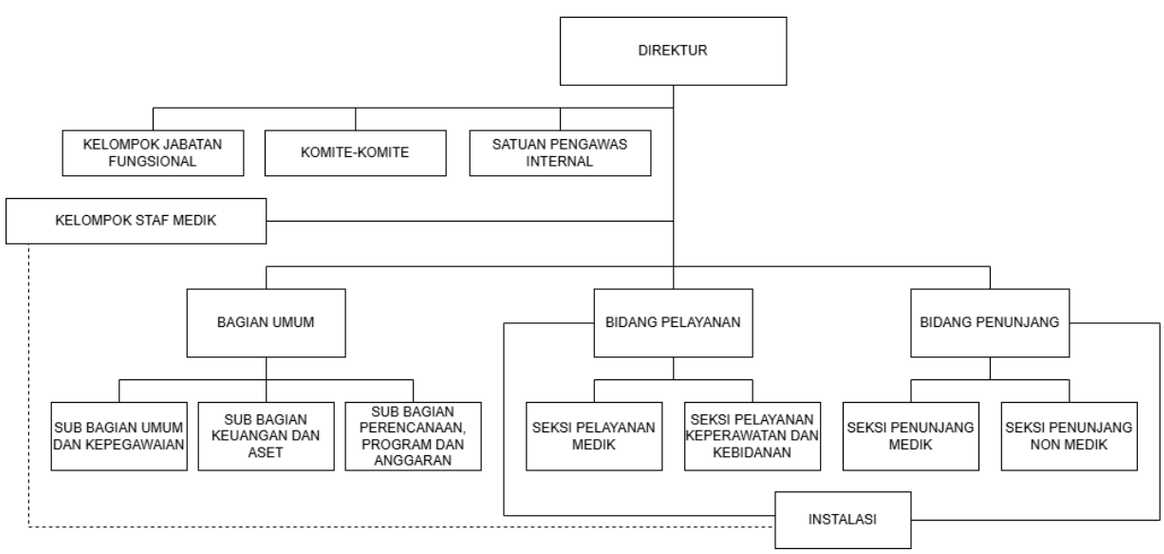

**Gambar 2.3**
**Struktur Organisasi**
**Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Tongas**

2. UPT

a. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). UPT Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang Dinas di bidang pelayanan Kesehatan masyarakat.

UPT puskesmas terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap. UPT Puskesmas di Kabupaten Probolinggo terdapat 33 (tiga puluh tiga) unit, yaitu:

1) UPT Puskesmas Bago;
2) UPT Puskesmas Bantaran;
3) UPT Puskesmas Banyuanyar;
4) UPT Puskesmas Besuk;
5) UPT Puskesmas Condong;
6) UPT Puskesmas Curahtulis;
7) UPT Puskesmas Dringu;
8) UPT Puskesmas Gending;
9) UPT Puskesmas Glagah;
10) UPT Puskesmas Jabungsisir;
11) UPT Puskesmas Jorongan;
12) UPT Puskesmas Klenang Kidul;
13) UPT Puskesmas Kotaanyar;
14) UPT Puskesmas Kraksaan;
15) UPT Puskesmas Krejengan;
16) UPT Puskesmas Krucil;
17) UPT Puskesmas Kuripan;
18) UPT Puskesmas Leces;

19) UPT Puskesmas Lumbang;
20) UPT Puskesmas Maron;
21) UPT Puskesmas Paiton;
22) UPT Puskesmas Pajarakan;
23) UPT Puskesmas Pakuniran;
24) UPT Puskesmas Ranugedang;
25) UPT Puskesmas Sukapura;
26) UPT Puskesmas Suko;
27) UPT Puskesmas Sumber;
28) UPT Puskesmas Sumberasih;
29) UPT Puskesmas Tegalsiwalan;
30) UPT Puskesmas Tiris;
31) UPT Puskesmas Tongas;
32) UPT Puskesmas Wangkal;

UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Puskesmas mempunyai fungsi pengelolaan, penatausahaan, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pelaporan dan monitoring evaluasi teknis pelayanan kesehatan.

UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:

1) Kepala Dinas;
2) Kepala Puskesmas;
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Puskesmas. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
2) Pelayanan Kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan Kesehatan perorangan dan pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringan pelayanan puskesmas;

3) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi kegiatan pelayanan Kesehatan tingkat pertama;
4) Pembinaan teknis terhadap kegiatan pelayanan Kesehatan tingkat pertama, jaringan pelayanan dan upaya Kesehatan berbasis masyarakat;
5) Pembinaan teknis terhadap kegiatan pelayanan Kesehatan tingkat pertama, jaringan pelayanan dan upaya Kesehatan berbasis msyarakat;
6) Pengoordinasian penyusunan Laporan kegiatan pelayanan Kesehatan tingkat pertama;
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Gambar 2.4**
**Susunan Organisasi UPT PUSKESMAS**

b. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Labkesda, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan pelayanan Laboratorium Kesehatan. UPT Labkesda merupakan UPT Kelas A. UPT Labkesda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan uji Laboratorium. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Labkesda mempunyai fungsi pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan monitoring evaluasi teknis pelayanan uji laboratorium klinik dan non klinik yang menjadi kewenangan daerah.

UPT Labkesda dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPT Labkesda mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, mengarahkan,

mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Labkesda. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Labkesda mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana kerja dan anggaran;
2) pelayanan uji laboratorium klinik meliputi pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitology klinik, imunologi klinik, patologi anatami dana tau pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
3) pelayanan uji laboratorium non klinik meliputi pemeriksaan mikrobiologi, fisika, kimia dan atau pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masayarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
4) penerapan teknologi pada laboratorium kesehatan;
5) penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
6) pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan uji laboratorium;
7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Gambar 2.5**
**Struktur Organisasi UPT LABKESDA**

## 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Pelaksanaan fungsi Dinas Kesehatan harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas,

berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Kesehatan.

A. Sarana Prasarana Kesehatan

Pemerintah harus melaksanakan prinsip *Good Governance* dalam melaksanakan pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan karena merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan Negara. Prinsip tersebut mencakup keadilan, responsivitas dan efisiensi pelayanan. Pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan merupakan indikator yang penting dalam sistem pelayanan kesehatan untuk mengetahui apakah pelayanan kesehatan sudah merata dan terjangkau.

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa Puskesmas harus didirikan minimal di setiap kecamatan. Lokasi pendirian puskesmas juga harus mempertimbangkan rasio penduduk dan/atau aksesibilitas. Standar rasio penduduk untuk setiap puskesmas sebesar 1:30.000 penduduk. Sedangkan standar aksesibilitas dilihat dari waktu tempuh desa/kelurahan terjauh dengan menggunakan moda transportasi yang banyak digunakan di daerah tersebut, yaitu:

- 60 (enam puluh) menit dari desa/kelurahan terjauh ke Puskesmas kawasan tidak terpencil; dan
- 120 (seratus dua puluh) menit dari desa/kelurahan terjauh ke Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Pada Tahun 2024, Puskesmas di Kabupaten Probolinggo berjumlah 33 Puskesmas dan tersebar di 24 kecamatan. Puskesmas tersebut terdiri dari 21 puskesmas perawatan (puskesmas dengan tempat tidur) dan 12 puskemas non perawatan, dengan rata-rata rasio puskesmas terhadap penduduk sebesar 1:35.916 penduduk. Dengan rasio tersebut, tentunya telah melebihi rasio maksimal yang ditetapkan untuk puskesmas. Sehingga perlu penambahan puskesmas di beberapa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tinggi (melebihi 30.000 jiwa), terutama yang memiliki desa/kelurahan dengan jarak tempuh ke puskesmas melebihi 60 menit.

**Tabel 2.1**
**Sebaran Puskesmas berdasarkan Jenis, Jumlah Penduduk,**
**dan Waktu Tempuh Desa/Kelurahan Terjauh**
**di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Puskesmas | Jenis | Jumlah Penduduk | Waktu Tempuh Desa/Kelurahan Terjauh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukapura | Sukapura | Rawat Inap | 19.925 jiwa | 60 menit |
| 2 | Sumber | Sumber | Rawat Jalan | 26.665 jiwa | 60 menit |
| 3 | Kuripan | Kuripan | Rawat Jalan | 31.258 jiwa | 35 menit |
| 4 | Bantaran | Bantaran | Rawat Inap | 45.235 jiwa | 26 menit |
| 5 | Leces | Leces | Rawat Inap | 37.875 jiwa | 60 menit |
| | | Jorongan | Rawat Jalan | 20.598 jiwa | 10 menit |
| 6 | Tegalsiwalan | Tegalsiwalan | Rawat Jalan | 38.519 jiwa | 22 menit |
| 7 | Banyuanyar | Banyuanyar | Rawat Jalan | 32.824 jiwa | 30 menit |
| | | Klenang Kidul | Rawat Jalan | 24.741 jiwa | 60 menit |
| 8 | Tiris | Tiris | Rawat Inap | 37.626 jiwa | 50 menit |
| | | Ranugedang | Rawat Inap | 34.562 jiwa | 30 menit |
| 9 | Krucil | Krucil | Rawat Inap | 58.989 jiwa | 45 menit |
| 10 | Gading | Wangkal | Rawat Inap | 35.069 jiwa | 25 menit |
| | | Condong | Rawat Inap | 20.608 jiwa | 20 menit |
| 11 | Pakuniran | Pakuniran | Rawat Inap | 26.027 jiwa | 120 menit |
| | | Glagah | Rawat Inap | 20.255 jiwa | 90 menit |
| 12 | Kotaanyar | Kotaanyar | Rawat Inap | 38.206 jiwa | 45 menit |
| 13 | Paiton | Paiton | Rawat Inap | 47.481 jiwa | 10 menit |
| | | Jabungsisir | Rawat Inap | 23.746 jiwa | 20 menit |
| 14 | Besuk | Besuk | Rawat Jalan | 30.826 jiwa | 10 menit |
| | | Bago | Rawat Inap | 21.550 jiwa | 20 menit |
| 15 | Kraksaan | Kraksaan | Rawat Jalan | 70.733 jiwa | 20 menit |
| 16 | Krejengan | Krejengan | Rawat Inap | 42.409 jiwa | 26 menit |
| 17 | Pajarakan | Pajarakan | Rawat Inap | 35.244 jiwa | 15 menit |
| 18 | Maron | Maron | Rawat Inap | 54.498 jiwa | 20 menit |
| | | Suko | Rawat Jalan | 14.198 jiwa | 11 menit |
| 19 | Gending | Gending | Rawat Inap | 43.387 jiwa | 15 menit |
| 20 | Dringu | Dringu | Rawat Jalan | 53.948 jiwa | 20 menit |
| 21 | Wonomerto | Wonomerto | Rawat Inap | 43.768 jiwa | 20 menit |
| 22 | Lumbang | Lumbang | Rawat Inap | 33.362 jiwa | 60 menit |
| 23 | Tongas | Tongas | Rawat Jalan | 36.643 jiwa | 30 menit |
| | | Curahtulis | Rawat Jalan | 33.689 jiwa | 60 menit |
| 24 | Sumberasih | Sumberasih | Rawat Inap | 66.467 jiwa | 90 menit |

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan

Selain fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan, terdapat pula fasilitas pelayanan kesehatan tingkat desa berupa Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Pada tahun 2024, terdapat 86 desa dengan puskesmas pembantu, 55 desa dengan Polindes, dan 159 desa dengan Ponkesdes.

Masing-masing unit pelayanan kesehatan desa dilengkapi dengan tenaga kesehatan (Bidan dan/atau Perawat).

**Tabel 2.2**
**Sebaran Unit Pelayanan Kesehatan Desa beserta Jumlah Tenaga Kesehatan Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024**

| No | Wilayah Kerja Puskesmas | Puskesmas Pembantu | | | Ponkesdes | | | Polindes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Faskes | Bidan | Perawat | Jumlah Faskes | Bidan | Perawat | Jumlah Faskes | Bidan |
| 1 | Sukapura | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | Sumber | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Kuripan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 | Bantaran | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Leces | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | Jorongan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | Tegalsiwalan | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | | |
| 8 | Banyuanyar | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | | |
| 9 | Klenang Kidul | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | | |
| 10 | Tiris | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | | |
| 11 | Ranugedang | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | | |
| 12 | Krucil | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 8 | | |
| 13 | Wangkal | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | | |
| 14 | Condong | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | | |
| 15 | Pakuniran | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | | |
| 16 | Glagah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | Kotaanyar | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 18 | Paiton | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 19 | Jabungsisir | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | Besuk | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | | |
| 21 | Bago | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | | |
| 22 | Kraksaan | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 11 | 3 | 3 |
| 23 | Krejengan | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 24 | Pajarakan | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 25 | Maron | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 26 | Suko | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | Gending | 4 | 4 | 4 | | | | 8 | 7 |
| 28 | Dringu | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 29 | Wonomerto | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | Lumbang | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 31 | Tongas | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 32 | Curahtulis | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| 33 | Sumberasih | 4 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| **TOTAL** | | **86** | **90** | **80** | **159** | **163** | **150** | **58** | **57** |

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan (SISDMK)

Untuk pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas maupun rujukan, dilengkapi pula dengan prasarana berupa puskesmas keliling dan ambulan di masing-masing puskesmas dengan jumlah dan kondisi sebagai berikut:

**Tabel 2.3**
**Jumlah Puskesmas Keliling dan Ambulans beserta Kondisinya**

| No | Wilayah Kerja Puskesmas | Pusling Roda 4 | | | Ambulans | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | Sukapura | | | | 3 | | |
| 2 | Sumber | | | | 3 | | |
| 3 | Kuripan | | | | 2 | | |
| 4 | Bantaran | 1 | | | 1 | | |
| 5 | Leces | | | | 3 | | |
| 6 | Jorongan | 1 | | | 1 | | |
| 7 | Tegalsiwalan | | | 1 | 2 | | |
| 8 | Banyuanyar | | | | 2 | | |
| 9 | Klenang Kidul | 1 | | | 1 | | |
| 10 | Tiris | | | | 3 | | |
| 11 | Ranugedang | | | | 2 | | |
| 12 | Krucil | | | | 1 | | 1 |
| 13 | Wangkal | | | | 2 | | |
| 14 | Condong | | | | 2 | | |
| 15 | Pakuniran | | | | 2 | | |
| 16 | Glagah | 1 | | | 1 | | |
| 17 | Kotaanyar | | | | 2 | | |
| 18 | Paiton | | | | 3 | | |
| 19 | Jabungsisir | | | | 1 | | |
| 20 | Besuk | 1 | | | 1 | | |
| 21 | Bago | | | | 2 | | |
| 22 | Kraksaan | | | | 3 | | |
| 23 | Krejengan | 1 | | | 1 | | |
| 24 | Pajarakan | 1 | | | 2 | | |
| 25 | Maron | 1 | | | 2 | | |
| 26 | Suko | | | | 2 | | |
| 27 | Gending | 1 | | | 2 | | |
| 28 | Dringu | | | | 3 | | |
| 29 | Wonomerto | | | | 2 | | |
| 30 | Lumbang | | | | 2 | | |
| 31 | Tongas | 1 | | | 1 | | |
| 32 | Curahtulis | 1 | | | 1 | | |
| 33 | Sumberasih | | | | 3 | | |
| **TOTAL** | | **11** | **0** | **1** | **64** | **0** | **1** |

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan

**Tabel 2.4**
**Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024**

| No | Wilayah Kerja Puskesmas | Kelengkapan | | | Akumulasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sarana | Prasarana | Alat Kesehatan | |
| 1 | Sukapura | 100 | 51,85 | 46,74 | 73,88 |
| 2 | Sumber | 100 | 42,59 | 46,09 | 72,69 |
| 3 | Kuripan | 100 | 38,89 | 41,34 | 70,42 |
| 4 | Bantaran | 100 | 62,96 | 70,26 | 84,4 |
| 5 | Leces | 100 | 44,44 | 50,6 | 74,69 |
| 6 | Jorongan | 97,78 | 42,59 | 25,84 | 63,48 |
| 7 | Tegalsiwalan | 100 | 51,85 | 40,61 | 71,43 |
| 8 | Banyuanyar | 100 | 57,41 | 40,82 | 72,07 |
| 9 | Klenang Kidul | 100 | 59,26 | 34,59 | 69,76 |
| 10 | Tiris | 100 | 48,15 | 34,86 | 68,76 |
| 11 | Ranugedang | 96,55 | 59,26 | 48,65 | 73,66 |
| 12 | Krucil | 100 | 53,7 | 48,35 | 74,71 |
| 13 | Wangkal | 100 | 68,52 | 47,75 | 75,95 |
| 14 | Condong | 100 | 46,3 | 38,54 | 70,05 |
| 15 | Pakuniran | 91,38 | 46,3 | 38,31 | 65,64 |
| 16 | Glagah | 94,83 | 42,59 | 39,06 | 67,3 |
| 17 | Kotaanyar | 100 | 51,85 | 53,26 | 76,49 |
| 18 | Paiton | 100 | 50 | 48,65 | 74,46 |
| 19 | Jabungsisir | 100 | 37,04 | 42,56 | 70,73 |
| 20 | Besuk | 100 | 42,59 | 34,64 | 68,12 |
| 21 | Bago | 100 | 42,59 | 45,71 | 72,54 |
| 22 | Kraksaan | 100 | 51,85 | 59,18 | 78,86 |
| 23 | Krejengan | 100 | 37,04 | 49,38 | 73,46 |
| 24 | Pajarakan | 100 | 44,44 | 44 | 72,04 |
| 25 | Maron | 100 | 53,7 | 64,2 | 81,05 |
| 26 | Suko | 93,33 | 42,59 | 34,92 | 64,9 |
| 27 | Gending | 100 | 55,56 | 39,94 | 71,53 |
| 28 | Dringu | 100 | 46,3 | 44,65 | 72,49 |
| 29 | Wonomerto | 100 | 44,44 | 47,15 | 73,3 |
| 30 | Lumbang | 100 | 70,37 | 62,91 | 82,2 |
| 31 | Tongas | 100 | 64,81 | 62,07 | 81,31 |
| 32 | Curahtulis | 100 | 38,89 | 52,51 | 74,89 |
| 33 | Sumberasih | 100 | 79,63 | 65,47 | 84,15 |

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan (ASPAK)

b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

Di Kabupaten Probolinggo terdapat 6 unit rumah sakit yang terdiri dari 2 Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Rumah Sakit Perkebunan (BUMN), 2 Rumah Sakit Umum Swasta, serta 1 Rumah Sakit khusus.

**Tabel 2.5**
**Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten Probolinggo**

| No | Nama Rumah Sakit | Jumlah Tempat Tidur |
|---|---|---|
| 1 | RSUD Waluyojati Kraksaan | 253 |
| 2 | RSUD Tongas | 102 |
| 3 | RSU Wonolangan Dringu | 101 |
| 4 | RS Graha Sehat Kraksaan | 101 |
| 5 | RS Rizani Paiton | 141 |
| 6 | RSIA Fatimah Kraksaan | 49 |
| **JUMLAH** | | **747** |

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan (Profil Kesehatan Tahun 2024)

Pemenuhan keberadaan rumah sakit diukur melalui standar proporsi tempat tidur, yaitu 1:1.000 penduduk. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Probolinggo mencapai 1.200.931 jiwa, sehingga untuk mencapai standar WHO, setidaknya dibutuhkan tempat tidur RS sebanyak 1.200 unit. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024, terdapat enam rumah sakit dengan total jumlah tempat tidur yang tersedia mencapai 747 unit, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 453 unit.

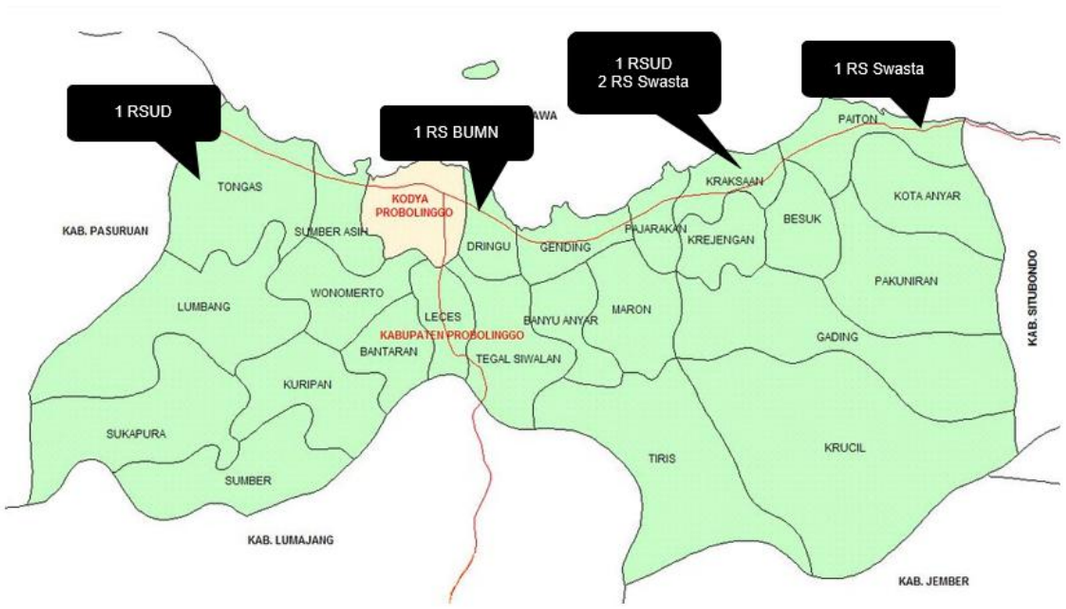


**Gambar 2.6**
**Sebaran Lokasi Rumah Sakit di Kabupaten Probolinggo**

Dari 6 rumah sakit yang ada di Kabupaten Probolinggo, 50% diantaranya terfokus pada satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kraksaan yang juga menjadi Pusat Pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan tiga lainnya tersebar di sepanjang jalan utama, mulai dari wilayah timur

(Kecamatan Paiton), tengah (Kecamatan Dringu), dan barat (Kecamatan Tongas).

**Tabel 2.6**
**Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Rumah Sakit di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024**

| No | Nama Rumah Sakit | Kelengkapan | | | Akumulasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sarana | Prasarana | Alat Kesehatan | |
| 1 | RSUD Waluyojati Kraksaan | 96,5 | 81,82 | 68,12 | 85,05 |
| 2 | RSUD Tongas | 73,76 | 79,55 | 35,85 | 63,55 |
| 3 | RSU Wonolangan Dringu | 100 | 70,45 | 43,74 | 77,21 |
| 4 | RS Graha Sehat Kraksaan | 60,06 | 88,64 | 49,63 | 62,65 |
| 5 | RS Rizani Paiton | 76,09 | 65,91 | 43,05 | 64,14 |
| 6 | RSIA Fatimah Kraksaan | 64,47 | 95,12 | 44,84 | 64,71 |

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan (ASPAK)

c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Selain Puskesmas dan rumah sakit, keberadaan sarana kesehatan lain sangat membantu terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Sarana kesehatan lain yang ada di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 meliputi:

- Klinik Pratama : 22 unit
- Klik Utama : 2 unit
- Tempat Praktik Mandiri Dokter : 12 unit
- Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi : 18 unit
- Tempat Praktik Mandiri Bidan : 9 unit
- Tempat Praktik Mandiri Perawat : 11 unit
- Unit Transfusi Darah : 1 unit
- Laboratorium Kesehatan : 3 unit
- Apotek : 61 unit
- Toko Obat : 5 unit

d. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasaan rata-rata sesuai dengan standart dan kode etik profesi. Salah satu komponen mutu pelayanan kesehatan adalah akses pelayanan kesehatan, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah letak pelayanan kesehatan dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Indikator mutu dan akses pelayanan kesehatan dapat terlihat dari kunjungan masyarakat ke

pelayanan kesehatan serta ketersediaan obat dan vaksin di pelayanan kesehatan tersebut baik milik pemerintah maupun swasta.

Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan secara umum dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2.7**
**Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**

| No | Akses dan Mutu Pelayanan | Standar | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan Kunjungan Rawat Jalan (di Puskesmas, RS, dan Klinik) | ≥100% | 108,7% | Terlampaui |
| 2 | Cakupan Kunjungan Rawat Inap (di Puskesmas, RS, dan Klinik) | ≥10% | 7% | Masih rendah |
| 3 | Angka kematian kasar/*Gross Death Rate* (GDR) di RS | ≤10 per 1.000 pasien keluar | 35 per 1.000 pasien keluar | Tinggi |
| 4 | Angka kematian murni/*Nett Death Rate* (NDR) di RS | ≤20 per 1.000 pasien keluar | 18,4 per 1.000 pasien keluar | Tercapai |
| 5 | *Bed Occupation Rate* (BOR) di RS | 60-85% | 81,2% | Optimal |
| 6 | *Bed Turn Over* (BTO) di RS | 40-60 kali | 83 kali | Terlalu tinggi |
| 7 | *Turn of Interval* (TOI) di RS | <1 hari | 0,8 hari | Baik |
| 8 | *Average Length of Stay* (ALOS) di RS | 3-5 hari | 3,2 hari | Baik |
| 9 | Puskesmas dengan ketersediaan obat vaksin & essensial | 100% | 100% | Tercapai |

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Berdasarkan data akses dan mutu layanan pada Tabel 2.5 di atas, dapat disampaikan beberapa hal berikut:

- Pelayanan rawat jalan melampaui target, menandakan tingginya akses penduduk ke Fasilitas pelayanan kesehatan;
- BOR di level optimal, TOI singkat, dan ALOS dalam kisaran ideal memperlihatkan efisiensi pemanfaatan tempat tidur;
- Ketersediaan obat vaksin dan esensial di 100 % Puskesmas mendukung pelayanan primer yang kuat;
- Cakupan kunjungan rawat inap masih rendah, menandakan keterbatasan kapasitas atau hambatan akses;
- GDR jauh di atas batas ideal, mengindikasikan masalah kualitas klinis atau keterlambatan penanganan;
- BTO yang terlalu tinggi dapat memicu kelelahan petugas dan menurunkan kualitas perawatan.

e. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) adalah suatu upaya kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan

kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Berbagai macam UKBM seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Poskesdes, Polindes, Posbindu PTM.

Dalam perkembangannya, Posyandu mendapat tanggapan yang positif oleh masyarakat. Hal ini juga diimbangi dengan adanya alokasi dana untuk menunjang kegiatan Posyandu dengan pemberian insentif kepada kader Posyandu. Secara umum, Kualitas suatu posyandu dapat dilihat berdasarkan Telaah Kemandirian Posyandu, yaitu suatu cara pengelompokkan posyandu menjadi Posyandu aktif dan posyandu tidak aktif.

Seperti Pada Gambar 2.7, tingkat posyandu aktif di Kabupaten Probolinggo mencapai 94,6% (1.269 posyandu) dari seluruh posyandu (1.342 posyandu) yang ada, kondisi ini sudah melampaui target yang ditetapkan pada Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024 sebesar 80%. Sisanya terdapat 73 posyandu (5,4%) yang dinilai tidak aktif karena belum memiliki minimal 5 orang kader.

Posyandu yang termasuk Posyandu aktif adalah Posyandu yang sudah dapat Melakukan kegiatan rutin posyandu (pelayanan kesehatan ibu hamil/balita/ remaja/usia produktif/lansia) 1 kali dalam satu sebulan minimal 8 kali per tahun, serta memiliki cakupan sasaran Ibu Hamil, Balita, Remaja, Usia Produktif, dan Lanjut Usia dalam satu Bulan. Memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil dan atau balita dan atau remaja, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih yang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

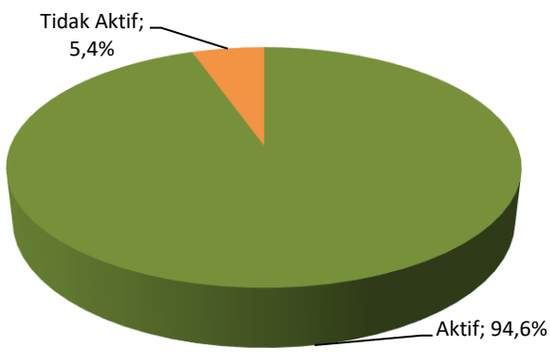


**Gambar 2.7**
**Strata Posyandu di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024**

Kabupaten probolinggo memiliki 1.342 Posyandu yang tersebar di seluruh desa dan Kelurahan. Intensitas Pembinaan dan evaluasi dari TIM Posyandu Kabupaten dan Puskesmas menjadi penting untuk dilaksanakan mengingat kedepannya Posyandu juga mengalami Trasformasi Pelayanan Kesehatan yang pelayanan Posyandu diperuntukkan untuk seluruh sasaran

siklus hidup, yaitu: ibu hamil dan menyusui; bayi dan balita; usia sekolah dan remaja, serta usia produktif dan lanjut usia. Melalui Posyandu, layanan sosial dasar bidang kesehatan untuk seluruh siklus hidup menjadi lebih dekat ke masyarakat.

Kecakapan kader posyandu juga harus bertrasformasi menjadi 25 Kompetensi Dasar. Kader Posyandu Aktif Dalam Transformasi Layanan Primer memiliki Kompetensi Dasar yang terdiri dari:

1) Kompetensi Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Ibu Menyusui:
    a) Menjelaskan materi Buku KIA kepada ibu hamil
    b) Menjelaskan pemeriksaan ibu hamil 6 kali dan ibu nifas 4 kali
    c) Melakukan edukasi isi piringku ibu hamil dan Ibu menyusui
    d) Menjelaskan pencegahan anemia, anjuran Tablet Tambah Darah selama hamil
    e) Menjelaskan ibu hamil memantau status gizi dan tekanan darah dengan Kurva buku KIA
    f) Menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan ibu nifas
2) Kompetensi Balita Anak Pra Sekolah;
    a) Menjelaskan materi Buku KIA pada ibu/pengasuh
    b) Melakukan edukasi ASI Ekslusif, MP ASI dan pemberian makan kaya protein hewani sesuai umur balita
    c) Melakukan penimbangan, pengukuran Panjang/tinggi badan dan lingkar kepala serta ploting dalam Buku KIA
    d) Menjelaskan status gizi dan penanganannya
    e) Menjelaskan stimulasi perkembangan, vit A dan obat cacing sesuai umur anak
    f) Melakukan edukasi imunisasi sesuai umur anak dan PD3i
    g) Menjelaskan pemantauan tanda bahaya
3) Kompetensi Usia Sekolah dan Remaja
    a) Melakukan edukasi isi piringku dan aktivitas fisik
    b) Menjelaskan program pencegahan anemia (TTD remaja putri dan skrining HB)
    c) Melakukan edukasi bahaya merokok dan napza
4) Kompetensi Usia Produktif dan Lanjut Usia
    a) Melakukan skrining hipertensi dan diabetes
    b) Memahami komplikasi dan pengobatan hipertensi dan diabetes
    c) Memahami skrining tuberkulusis dan kepatuhan pengobatan tuberkolusis
    d) Melaksanakan edukasi keluarga berencana

e) Melakukan skrining lanjut usia

5) Pengelolaan Posyandu

a) Memahami pengelolaan posyandu

b) Melakukan kunjungan rumah

c) Melakukan pencatatan dan pelaporan

d) Menerapkan komunikasi antar pribadi

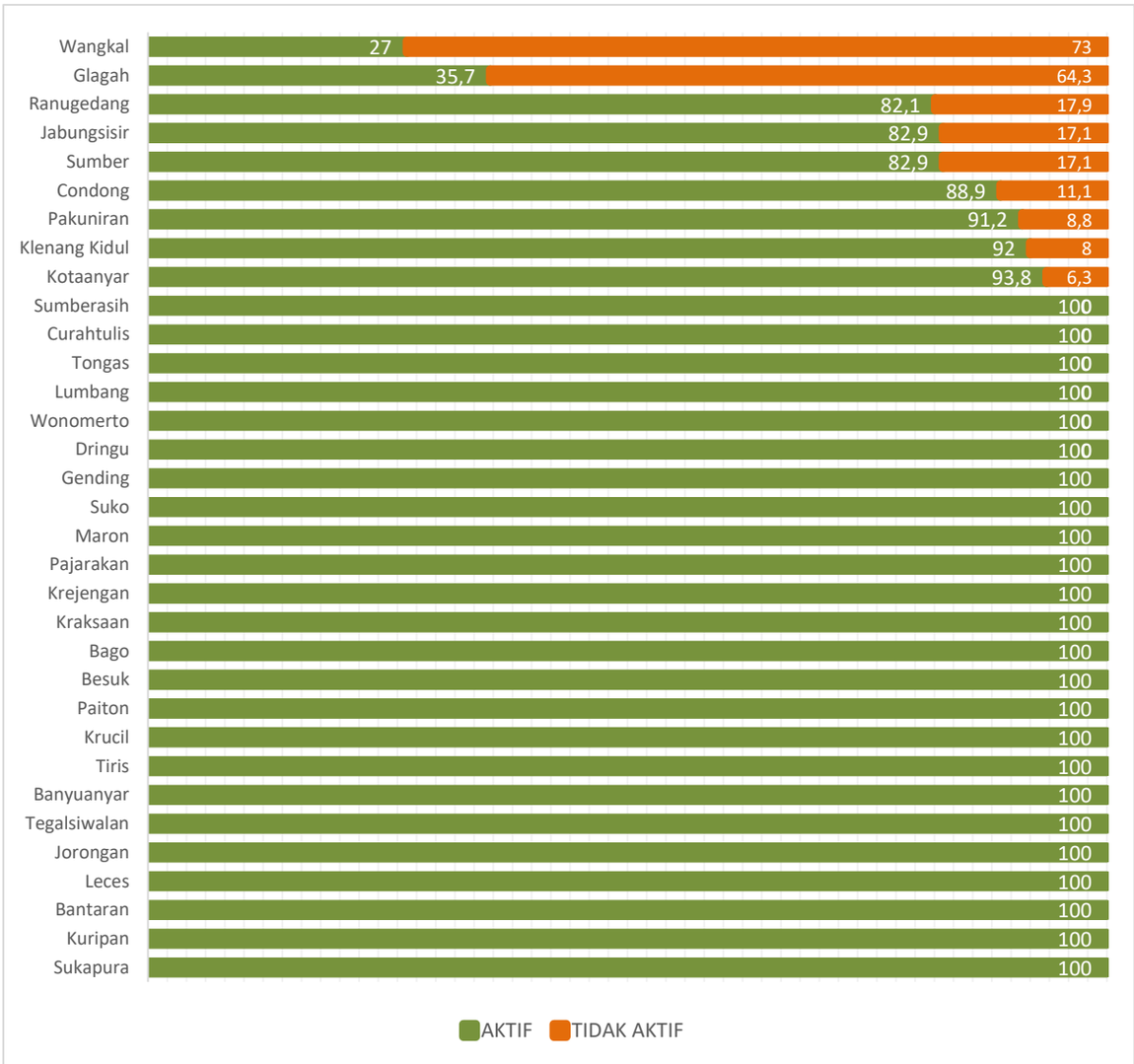


**Gambar 2.8 Posyandu Aktif Kabupaten Probolinggo Tahun 2024**

B. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Kesehatan sesuai struktur organisasi terdiri dari pejabat eselon, fungsional nakes, dan staf/non eselon. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dan UPTnya sampai tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 2.851 orang, dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.8**
**Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian**
**Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024**

| No | Unit Kerja | ASN | | Non ASN | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | PPPK | | |
| 1 | Dinas Kesehatan | 67 | 10 | 23 | 100 |
| 2 | RSUD Waluyojati | 301 | 138 | 266 | 705 |
| 3 | RSUD Tongas | 134 | 57 | 86 | 277 |
| 4 | Puskesmas Sukapura | 35 | 16 | 6 | 57 |
| 5 | Puskesmas Sumber | 24 | 9 | 6 | 39 |
| 6 | Puskesmas Kuripan | 21 | 12 | 7 | 40 |
| 7 | Puskesmas Bantaran | 29 | 12 | 4 | 45 |
| 8 | Puskesmas Leces | 33 | 13 | 9 | 55 |
| 9 | Puskesmas Jorongan | 23 | 7 | 2 | 32 |
| 10 | Puskesmas Tegalsiwalan | 29 | 17 | 5 | 51 |
| 11 | Puskesmas Banyuanyar | 28 | 8 | 6 | 42 |
| 12 | Puskesmas Klenang Kidul | 27 | 9 | 7 | 43 |
| 13 | Puskesmas Tiris | 26 | 11 | 11 | 48 |
| 14 | Puskesmas Ranugedang | 21 | 18 | 7 | 46 |
| 15 | Puskesmas Krucil | 37 | 22 | 2 | 61 |
| 16 | Puskesmas Wangkal | 28 | 20 | 12 | 60 |
| 17 | Puskesmas Condong | 30 | 11 | 5 | 46 |
| 18 | Puskesmas Pakuniran | 28 | 18 | 7 | 53 |
| 19 | Puskesmas Glagah | 19 | 15 | 9 | 43 |
| 20 | Puskesmas Kotaanyar | 38 | 17 | 10 | 65 |
| 21 | Puskesmas Paiton | 34 | 21 | 15 | 70 |
| 22 | Puskesmas Jabungsisir | 26 | 11 | 10 | 47 |
| 23 | Puskesmas Besuk | 34 | 12 | 7 | 53 |
| 24 | Puskesmas Bago | 30 | 13 | 6 | 49 |
| 25 | Puskesmas Kraksaan | 44 | 15 | 13 | 72 |
| 26 | Puskesmas Krejengan | 31 | 26 | 14 | 71 |
| 27 | Puskesmas Pajarakan | 33 | 15 | 14 | 62 |
| 28 | Puskesmas Maron | 45 | 20 | 22 | 87 |
| 29 | Puskesmas Suko | 17 | 12 | 6 | 35 |
| 30 | Puskesmas Gending | 33 | 19 | 10 | 62 |
| 31 | Puskesmas Dringu | 32 | 15 | 7 | 54 |
| 32 | Puskesmas Wonomerto | 34 | 10 | 14 | 58 |
| 33 | Puskesmas Lumbang | 34 | 11 | 8 | 53 |
| 34 | Puskesmas Tongas | 31 | 11 | 3 | 45 |
| 35 | Puskesmas Curahtulis | 25 | 11 | 2 | 38 |
| 36 | Puskesmas Sumberasih | 32 | 27 | 16 | 75 |
| 37 | UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah | 5 | 5 | 2 | 12 |
| **TOTAL** | | **1.498** | **694** | **659** | **2.851** |

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel 2.8, dapat diketahui bahwa sebagian besar (76,89%) pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo berstatus ASN, dimana

24,34% diantaranya (sebanyak 694 orang) merupakan tenaga PPPK. Selebihnya, masih terdapat 23,11% (sebanyak 659 orang) tenaga dengan status non ASN.

**Tabel 2.9**
**Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**
**di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024**

| No | Unit Kerja | S-2 | S-1 | D-IV | D-III | D-I | SMP/A | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan | 14 | 40 | 7 | 15 | 0 | 24 | 100 |
| 2 | RSUD Waluyojati | 54 | 204 | 34 | 279 | 5 | 129 | 705 |
| 3 | RSUD Tongas | 3 | 63 | 5 | 131 | 5 | 70 | 277 |
| 4 | Puskesmas Sukapura | 0 | 13 | 0 | 38 | 0 | 6 | 57 |
| 5 | Puskesmas Sumber | 0 | 6 | 1 | 29 | 0 | 3 | 39 |
| 6 | Puskesmas Kuripan | 0 | 9 | 2 | 23 | 0 | 6 | 40 |
| 7 | Puskesmas Bantaran | 1 | 8 | 3 | 26 | 0 | 7 | 45 |
| 8 | Puskesmas Leces | 2 | 9 | 5 | 32 | 1 | 6 | 55 |
| 9 | Puskesmas Jorongan | 2 | 7 | 4 | 16 | 0 | 3 | 32 |
| 10 | Puskesmas Tegalsiwalan | 0 | 14 | 2 | 34 | 0 | 1 | 51 |
| 11 | Puskesmas Banyuanyar | 1 | 10 | 2 | 23 | 1 | 5 | 42 |
| 12 | Puskesmas Klenang Kidul | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 1 | 43 |
| 13 | Puskesmas Tiris | 0 | 7 | 1 | 32 | 0 | 8 | 48 |
| 14 | Puskesmas Ranugedang | 0 | 5 | 1 | 34 | 0 | 6 | 46 |
| 15 | Puskesmas Krucil | 0 | 15 | 2 | 42 | 0 | 2 | 61 |
| 16 | Puskesmas Wangkal | 0 | 13 | 4 | 36 | 0 | 7 | 60 |
| 17 | Puskesmas Condong | 0 | 13 | 4 | 25 | 0 | 4 | 46 |
| 18 | Puskesmas Pakuniran | 0 | 16 | 6 | 29 | 0 | 2 | 53 |
| 19 | Puskesmas Glagah | 0 | 8 | 3 | 27 | 1 | 4 | 43 |
| 20 | Puskesmas Kotaanyar | 0 | 14 | 5 | 37 | 0 | 9 | 65 |
| 21 | Puskesmas Paiton | 1 | 22 | 7 | 31 | 0 | 9 | 70 |
| 22 | Puskesmas Jabungsisir | 1 | 10 | 4 | 26 | 1 | 5 | 47 |
| 23 | Puskesmas Besuk | 1 | 12 | 2 | 31 | 1 | 6 | 53 |
| 24 | Puskesmas Bago | 0 | 15 | 1 | 30 | 0 | 3 | 49 |
| 25 | Puskesmas Kraksaan | 1 | 22 | 7 | 35 | 0 | 7 | 72 |
| 26 | Puskesmas Krejengan | 0 | 19 | 6 | 39 | 0 | 7 | 71 |
| 27 | Puskesmas Pajarakan | 1 | 9 | 4 | 36 | 1 | 11 | 62 |
| 28 | Puskesmas Maron | 0 | 20 | 4 | 49 | 0 | 14 | 87 |
| 29 | Puskesmas Suko | 0 | 7 | 3 | 20 | 0 | 5 | 35 |
| 30 | Puskesmas Gending | 0 | 10 | 6 | 37 | 0 | 9 | 62 |
| 31 | Puskesmas Dringu | 1 | 13 | 10 | 24 | 0 | 6 | 54 |
| 32 | Puskesmas Wonomerto | 0 | 11 | 7 | 26 | 0 | 14 | 58 |
| 33 | Puskesmas Lumbang | 1 | 10 | 6 | 29 | 1 | 6 | 53 |
| 34 | Puskesmas Tongas | 0 | 9 | 3 | 26 | 0 | 7 | 45 |
| 35 | Puskesmas Curahtulis | 0 | 7 | 3 | 25 | 0 | 3 | 38 |
| 36 | Puskesmas Sumberasih | 2 | 15 | 10 | 37 | 0 | 11 | 75 |
| 37 | UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| **TOTAL** | | **86** | **700** | **179** | **1.441** | **18** | **403** | **2.851** |

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan

**Tabel 2.10**
**Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas**
**Kabupaten Probolinggo Tahun 2024**

| No | Jenis Tenaga | Standar SDM Kesehatan | | Jumlah SDM Kesehatan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Non Rawat Inap | Rawat Inap | Kebutuhan | Tersedia | Kesenjangan |
| **A** | **Tenaga Medis** | | | | | |
| 1 | a. Dokter yang memiliki kompetensi di bidang Kedokteran Keluarga Layanan Primer | 1 | 1 | 33 | 0 | -33 |
| | b. Dokter | 3 – 4 | 3 – 4 | 132 | 40 | -92 |
| 2 | Dokter gigi | 1 – 2 | 1 – 2 | 66 | 36 | -30 |
| **B** | **Tenaga Kesehatan** | | | | | |
| 3 | Perawat vokasi dan/atau ners | 7 – 9 | 8 – 10 | 317 | 352 | 35 |
| 4 | Bidan vokasi dan/atau bidan profesi | 6 – 8 | 7 – 8 | 264 | 288 | 24 |
| 5 | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dan/atau tenaga kesehatan masyarakat | 2 | 2 | 66 | 37 | -29 |
| 6 | Epidemiolog Kesehatan dan/atau tenaga kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 66 | 1 | -65 |
| 7 | Tenaga Sanitasi Lingkungan dan/atau Tenaga Kesehatan Masyarakat | 1 | 1 | 33 | 25 | -8 |
| 8 | Nutrisionis | 2 | 2 | 66 | 44 | -22 |
| 9 | Apoteker | 2 | 2 | 66 | 21 | -45 |
| 10 | Tenaga Teknologi Laboratorium Medik | 2 – 3 | 2 – 3 | 99 | 42 | -57 |
| 11 | Psikolog Klinis | 1 | 1 | 33 | 0 | -33 |
| 12 | Fisioterapis | 1 | 1 | 33 | 1 | -32 |
| 13 | Terapis Gigi dan Mulut | 1 | 1 | 33 | 19 | -14 |
| | **TOTAL** | **32 – 39** | **34 – 40** | **1.307** | **906** | **-401** |

Sumber : Permenkes no 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Catatan : Data kebutuhan SDM Kesehatan hanya untuk Puskesmas Induk (sebanyak 33 unit), tidak termasuk kebutuhan tenaga kesehatan di desa

Sampai saat ini jumlah tenaga kesehatan masih belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini terlihat dari rasio jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Probolinggo jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Menyikapi kekurangan ini, diusulkan permintaan kebutuhan tenaga kesehatan kepada Badan Kepegawaian Daerah.

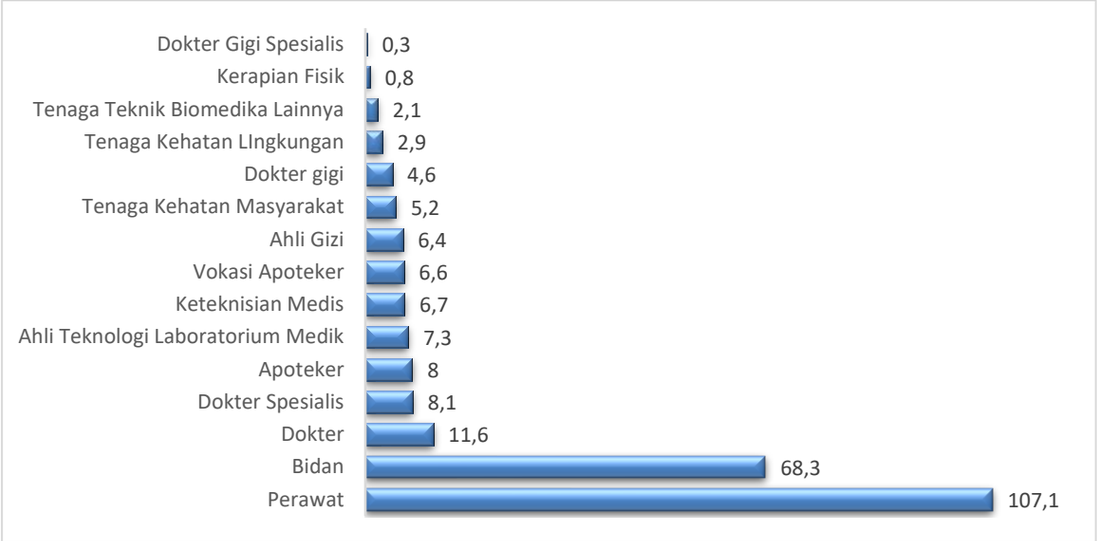


**Gambar 2.9**
**Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024**

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Probolinggo tahun 2024 sebanyak 2.863 orang, yang tersebar di 33 puskesmas dan jaringannya, di Rumah Sakit, dan di sarana kesehatan lainnya. Sementara bila dilihat per jenis tenaganya terbagi atas :

a. Dokter Spesialis yang tercatat berpraktek dan terdaftar di sarana kesehatan berjumlah 96 orang, sehingga rasio dokter spesialis sebesar 8,1 per 100.000 penduduk. Dokter Gigi Spesialis yang tercatat berpraktek dan terdaftar di sarana kesehatan berjumlah 4 orang, sehingga rasio dokter spesialis sebesar 0,3 per 100.000 penduduk.
b. Dokter Umum yang tercatat berpraktek dan terdaftar di sarana kesehatan berjumlah 137 orang, sehingga rasio dokter umum sebesar 16,2 per 100.000 penduduk. Kondisi tersebut masih dibawah target sebesar 43 per 100.000 penduduk.
c. Dokter Gigi yang tercatat berpraktek dan terdaftar berjumlah 54 orang, sehingga rasio dokter gigi sebesar 4,6 per 100.000 penduduk. Kondisi tersebut masih dibawah target sebesar 10 per 100.000 penduduk.
d. Tenaga Keperawatan yang terdiri atas S-1 keperawatan, D-III perawat dan lulusan SPK tercatat berpraktek dan terdaftar sebanyak 1.269 orang, sehingga rasio perawat sebesar 107,1 per 100.000 penduduk.
e. Jumlah tenaga bidan tercatat berpraktek dan terdaftar sebanyak 809 orang, sehingga rasio tenaga bidan sebesar 68,3 per 100.000 penduduk. Kondisi tersebut masih dibawah target sebesar 100 per 100.000 penduduk.
f. Tenaga Kefarmasian tercatat berpraktek dan terdaftar yang terdiri atas tenaga Apoteker, S-1 farmasi, D-III farmasi dan asisten apoteker sebanyak 173 orang,

dimana 95 orang diantaranya adalah tenaga apoteker dengan rasio tenaga kefarmasian sebesar 14,6 per 100.000 penduduk.

g. Tenaga Ahli Gizi tercatat berpraktek dan terdaftar yang terdiri atas D-IV/S-1 Gizi, D-III gizi dan D-I gizi sebanyak 76 orang dengan rasio tenaga ahli gizi sebesar 6,4 per 100.000 penduduk.
h. Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat terdaftar yang terdiri dari Sarjana Kesehatan Masyarakat dan D-III Kesmas sebanyak 62 orang dengan rasio tenaga ahli kesehatan masyarakat sebesar 5,2 per 100.000 penduduk.
i. Tenaga Ahli Kesehatan Lingkungan yang terdiri dari S1, D-III dan D-I sebanyak 34 orang dengan rasio tenaga ahli sanitasi sebesar 2,9 per 100.000 penduduk.
j. Tenaga Keterapian Fisik di Kabupaten Probolinggo sebanyak 9 orang yang merupakan petugas Fisioterapi dengan rasio tenaga ahli sanitasi sebesar 0,8 per 100.000 penduduk.
k. Jumlah tenaga keteknisian medis di Kabupaten Probolinggo tahun 2024 sebanyak 80 orang dengan rasio 6,7 per 100.000 penduduk

C. Aset Perangkat Daerah

Prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.11**
**Jumlah Aset Tetap Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Periode sampai 31 Desember 2024**

| Kode Barang | Jenis Barang | Satuan | Dinas Kesehatan | | Rumah Sakit Umum Daerah | | Puskesmas | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah | Nilai Perolehan | Jumlah | Nilai Perolehan | Jumlah | Nilai Perolehan | Jumlah | Nilai Perolehan |
| **1.3.2001** | **TANAH** | | | **1.377.526.773,35** | | **6.242.484.533,33** | | **14.509.810.450,35** | | **22.129.821.757,03** |
| 1.3.1.01 | Tanah | Bidang | 5 | 1.377.526.773,35 | 11 | 6.242.484.533,33 | 220 | 14.509.810.450,35 | 236 | 22.129.821.757,03 |
| **1.3.2002** | **PERALATAN DAN MESIN** | | | **27.355.073.843,70** | | **352.311.277.632,87** | **35.639** | **178.879.212.023,68** | | **558.545.563.500,25** |
| 1.3.2.01 | Alat Besar | Unit | 3 | 345.752.000,00 | 44 | 6.952.949.800,00 | 66 | 2.848.246.228,00 | 113 | 10.146.948.028,00 |
| 1.3.2.02 | Alat Angkutan | Unit | 37 | 5.923.646.029,00 | 35 | 9.812.682.607,00 | 436 | 33.976.985.036,00 | 508 | 49.713.313.672,00 |
| 1.3.2.03 | Alat Bengkel Dan Alat Ukur | Unit | 0 | 0 | 138 | 243.158.668,00 | 108 | 436.106.734,20 | 246 | 679.265.402,20 |
| 1.3.2.04 | Alat Pertanian | Unit | | 831.458.300,00 | 4 | 9.415.100,00 | 33 | 32.959.982,00 | 37 | 873.833.382,00 |
| 1.3.2.05 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga | Unit | 1.276 | 3.647.167.065,00 | 6.608 | 20.466.165.748,95 | 10.008 | 18.784.909.238,32 | 17.892 | 42.898.242.052,27 |
| 1.3.2.06 | Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar | Unit | 54 | 270.224.984,00 | 741 | 2.159.799.475,00 | 341 | 1.755.511.441,59 | 1136 | 4.185.535.900,59 |
| 1.3.2.07 | Alat Kedokteran Dan Kesehatan | Unit | 1.072 | 8.027.250.697,30 | 7.472 | 291.993.370.506,52 | 21.003 | 86.083.005.480,51 | 29.547 | 386.103.626.684,33 |
| 1.3.2.08 | Alat Laboraturium | Unit | 119 | 5.526.923.158,60 | 181 | 11.245.848.948,00 | 1.276 | 20.072.280.805,75 | 1.576 | 36.845.052.912,35 |
| 1.3.2.09 | Alat Persenjataan | Unit | | | 8 | 8.299.700,00 | 0 | 0 | 8 | 8.299.700,00 |
| 1.3.2.10 | Komputer | Unit | 227 | 2.200.478.434,80 | 979 | 7.365.211.079,40 | 2.282 | 13.609.757.267,30 | 3.488 | 23.175.446.781,50 |
| 1.3.2.11 | Alat Eksplorasi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Alat Pengeboran | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Alat Bantu Eksplorasi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Alat Keselamatan Kerja | Unit | 15 | 582.173.175,00 | 27 | 1.985.398.500,00 | 41 | 1.310.920.466,00 | 83 | 3.878.492.141,00 |
| 1.3.2.16 | Alat Peraga | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Peralatan Proses/Produksi | Unit | 0 | 0 | 30 | 37.500.000,00 | 0 | 0 | 30 | 37.500.000,00 |
| 1.3.2.18 | Rambu - Rambu | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 91.598.027,00 | 28 | 91.598.027,00 |
| 1.3.2.19 | Peralatan Olah raga | Unit | 0 | 0 | 3 | 31.477.500,00 | 16 | 40.395.316,00 | 19 | 71.872.816,00 |

| Kode Barang | Jenis Barang | Satuan | Dinas Kesehatan | | Rumah Sakit Umum Daerah | | Puskesmas | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah | Nilai Perolehan | Jumlah | Nilai Perolehan | Jumlah | Nilai Perolehan | Jumlah | Nilai Perolehan |
| **1.3.2003** | **GEDUNG DAN BANGUNAN** | | | **19.638.530.230,82** | | **165.289.642.598,18** | | **174.011.158.429,22** | | **358.939.331.258,22** |
| 1.3.3.01 | Gedung dan Bangunan | Meter Persegi | 41 | 19.638.530.230,82 | 123 | 162.894.818.525,54 | 475 | 173.213.145.566,90 | 639 | 355.746.494.323,26 |
| | Monumen | Meter Persegi | 0 | 0 | 3 | 586.556.208,64 | 4 | 33.092.731,27 | 7 | 619.648.939,91 |
| | Menara | Bidang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.649.600,00 | 1 | 2.649.600,00 |
| | Tugu Titik Kontrol/Pasti | Meter Persegi | 0 | 0 | 11 | 1.808.267.864,00 | 68 | 762.270.557,05 | 79 | 2.570.538.421,05 |
| **1.3.2004** | **JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI** | | | | **110** | **30.094.144.810,75** | | **5.363.114.378,00** | | **35.457.259.188,75** |
| 1.3.4.01 | Jalan dan Jembatan | Meter | | | 1 | 196.084.485,00 | 0 | 0 | 1 | 196.084.485,00 |
| 1.3.4.02 | Bangunan Air | Meter | 6,00 | | 14 | 6.852.842.905,50 | 13 | 1.398.673.813,00 | 33 | 8.251.516.718,50 |
| 1.3.4.03 | Instalasi | Meter | 20 | | 50 | 14.252.678.362,25 | 43 | 3.908.163.570,00 | 113 | 18.160.841.932,25 |
| 1.3.4.04 | Jaringan | Paket | 11,00 | | 46 | 8.988.623.543,00 | 8 | 56.277.008,00 | 65 | 9.044.900.551,00 |
| **1.3.2005** | **ASET TETAP LAIN** | | | | | | | **83.449.940,21** | | **83.449.940,21** |
| | Bahan Perpustakaan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 966.069,75 | 61 | 966.069,75 |
| | Barang Bercorak | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 82.483.870,46 | 20 | 82.483.870,46 |
| **1.3.2006** | **KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN** | | | | | **257.946.600,00** | | | | **257.946.600,00** |
| 1.3.6.01 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Unit | 0 | 0 | | 257.946.600,00 | 0 | 0 | | 257.946.600,00 |
| | | | | **48.371.130.847,87** | | **554.195.496.175,13** | | **372.846.745.221,46** | | **975.413.372.244,46** |

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Kesehatan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan beserta UPTnya dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.12**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo**

| No. | Indikator | Target NSPK | IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Angka Harapan Hidup | | | | 67,25 | 67,30 | 67,35 | 67,40 | 73,99 | 73,22 | 73,32 | 73,58 | 73,8 | 73,93 | 1,089 | 1,089 | 1,093 | 1,095 | 0,999 |
| 2 | Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59,91 | 60,49 | 80,57 | 94,34 | 96,11 | 0,599 | 0,605 | 0,806 | 0,943 | 0,961 |
| 3 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | | | 16 (Renstra Kemkes) | 12,8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8,11 | 10,38 | 12,66 | 14,59 | 13,8 | 1,366 | 1,135 | 0,945 | 0,784 | 0,850 |
| 4 | Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | | | 183 (Renstra Kemkes) | 98 | 93 | 92 | 91 | 91 | 99,33 | 201,78 | 123,14 | 140,37 | 103,56 | 0,986 | -0,170 | 0,662 | 0,457 | 0,862 |
| 5 | Prevalensi Balita Stunting | | | 14 (Renstra Kemkes) | 21 | 15,89 | 15,64 | 15,39 | 15 | 16,1 | 14,98 | 14,87 | 13 | 11,26 | 1,233 | 1,057 | 1,049 | 1,155 | 1,249 |
| 6 | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 7 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | | 100 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,43 | 87,74 | 85,55 | 99,32 | 92,74 | 0,884 | 0,877 | 0,856 | 0,993 | 0,927 |
| 8 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | | 100 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,14 | 98,13 | 97,78 | 99,61 | 98,89 | 0,981 | 0,981 | 0,978 | 0,996 | 0,989 |
| 9 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | 100 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,36 | 101,56 | 99,01 | 98,52 | 100 | 1,034 | 1,016 | 0,990 | 0,985 | 1,000 |
| 10 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | | 100 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,1 | 94,11 | 94,73 | 94,64 | 97,75 | 0,911 | 0,941 | 0,947 | 0,946 | 0,978 |
| 11 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 100 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 19,97 | 29,23 | 80,87 | 100 | 93,7 | 0,200 | 0,292 | 0,809 | 1,000 | 0,937 |
| 12 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | | 100 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 14,5 | 22,48 | 31,13 | 70 | 79,15 | 0,145 | 0,225 | 0,311 | 0,700 | 0,792 |

| No. | Indikator | Target NSPK | IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 13 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | | 100 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 44,1 | 53,91 | 73,44 | 91,39 | 91,12 | 0,441 | 0,539 | 0,734 | 0,914 | 0,911 |
| 14 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 100 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 9,4 | 14,34 | 22,46 | 78,64 | 100 | 0,094 | 0,143 | 0,225 | 0,786 | 1,000 |
| 15 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 100 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 61 | 51,68 | 82,08 | 100 | 100 | 0,610 | 0,517 | 0,821 | 1,000 | 1,000 |
| 16 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | | 100 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 17 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | | 100 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 40,11 | 25,1 | 116,62 | 100 | 100 | 0,401 | 0,251 | 1,166 | 1,000 | 1,000 |
| 18 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | | 100 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 48,8 | 47,64 | 83,2 | 100 | 100 | 0,488 | 0,476 | 0,832 | 1,000 | 1,000 |

Penghitungan prosentase pencapaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus: $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$

Berdasarkan gambaran tersebut, pencapaian indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Terdapat 8 (delapan) indikator yang telah mencapai target, namun demikian peningkatan kualitas kegiatan yang mendukung indikator tersebut tetap harus dilakukan untuk dapat mencapai target nasional serta mencapai derajat Kesehatan masyarakat Kabupaten Probolinggo setinggi-tingginya. Adapun indikator kinerja yang telah tercapai sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:
   a. Prevalensi Balita Stunting mencapai 11,26%;
   b. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi mencapai 100%;
   c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir mencapai 100%;
   d. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 100%;
   e. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 100%;
   f. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar mencapai 100%;
   g. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar mencapai 100% ; dan
   h. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar mencapai 100%.

2) Terdapat 10 (sepuluh) indikator yang belum mencapai target, yaitu:

   **a. Angka Harapan Hidup**

   Angka Harapan Hidup di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 mencapai 73,93, semakin meningkat pada 3 tahun terakhir meskipun belum mencapai target. Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata umur penduduk mulai lahir sampai dengan akhir hidupnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

AHH yaitu terjangkaunya akses pelayanan Kesehatan yang bermutu baik fasilitas maupun SDM, layanan cek kesehatan gratis dan menekankan penurunan kematian ibu/bayi serta penyakit degeneratif — intervensi primer seperti ini secara langsung menaikkan AHH, tercukupinya anggaran Kesehatan sesuai prioritas, serta tercapainya pembiayaan Kesehatan melalui *Universal Health Coverage* (UHC).

**b. Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan meningkat pada 3 tahun terkahir, dimana pada tahun 2024 mencapai 96,11%. Dari 12 indikator layanan SPM bidang Kesehatan, 6 indikator yang telah mencapai target, yaitu Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dan Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih dari setiap pelaksana program di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskemas. Secara umum, beberapa hal yang menyebabkan rendahnya capaian SPM adalah:

1) Aspek kesadaran dan perilaku masyarakat, masih terdapat kelompok sasaran yang enggan memanfaatkan layanan kesehatan. Masyarakat usia produktif umumnya merasa sehat sehingga kurang termotivasi untuk mengikuti skrining atau pemeriksaan rutin. Demikian pula pada kelompok lansia, sebagian enggan datang ke fasilitas kesehatan karena keterbatasan mobilitas atau persepsi bahwa dirinya tidak sakit. Pada kelompok anak usia sekolah, pendataan dan keterjangkauan layanan juga menjadi kendala ketika program UKS maupun posyandu sekolah belum berjalan secara optimal;
2) Sisi aksesibilitas dan keterjangkauan, luasnya wilayah Kabupaten Probolinggo dengan banyak desa di daerah terpencil menjadi hambatan tersendiri. Jarak menuju puskesmas atau poskesdes relatif jauh, sementara transportasi dan biaya tidak langsung masih menjadi kendala, meskipun pelayanan kesehatan yang diberikan tidak dipungut biaya;
3) Terdapat keterbatasan tenaga kesehatan dan sistem pendataan. Puskesmas dengan wilayah kerja yang besar mengalami kesulitan menjangkau seluruh sasaran, khususnya dalam pelayanan skrining usia

lanjut. Selain itu, perbedaan antara data sasaran (yang menggunakan proyeksi BPS) dengan data capaian (yang berasal dari kunjungan riil) menimbulkan ketidaksesuaian, sehingga persentase capaian terlihat lebih rendah dari kondisi lapangan.

4) Kualitas layanan juga berpengaruh terhadap capaian. Indeks SPM tidak hanya mengukur jumlah penerima layanan, tetapi juga aspek mutu minimal yang mencakup kesesuaian prosedur, tindak lanjut rujukan, serta kelengkapan pencatatan dan pelaporan. Beberapa layanan telah diberikan, namun tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga berdampak pada rendahnya nilai mutu dan indeks capaian.
5) Koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya optimal. Pada indikator anak usia sekolah, diperlukan kerjasama yang lebih erat dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah agar cakupan lebih tinggi. Sementara pada kelompok usia produktif, keterlibatan perusahaan maupun unit usaha kecil menengah (UKM) sangat diperlukan agar pekerja memiliki akses lebih mudah terhadap layanan kesehatan

**c. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup**

Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, sehingga program-program kesehatan banyak yang menitikberatkan pada upaya penurunan AKB, dimana AKB merujuk pada jumlah bayi yang meninggal antara fase kelahiran hingga bayi umur < 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan laporan kematian dari puskesmas pada tahun 2024 tercatat pada Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) 240 bayi meninggal dari 17.548 kelahiran hidup. Jumlah tersebut hanya meningkat 1 kasus apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Namun angka kematian bayi pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yaitu dari 14.3 menjadi 13,8 per 1.000 Kelahiran hidup. Puskesmas dengan Kematian bayi tertinggi yaitu Puskesmas Kraksaan, Sumberasih dan Krucil.

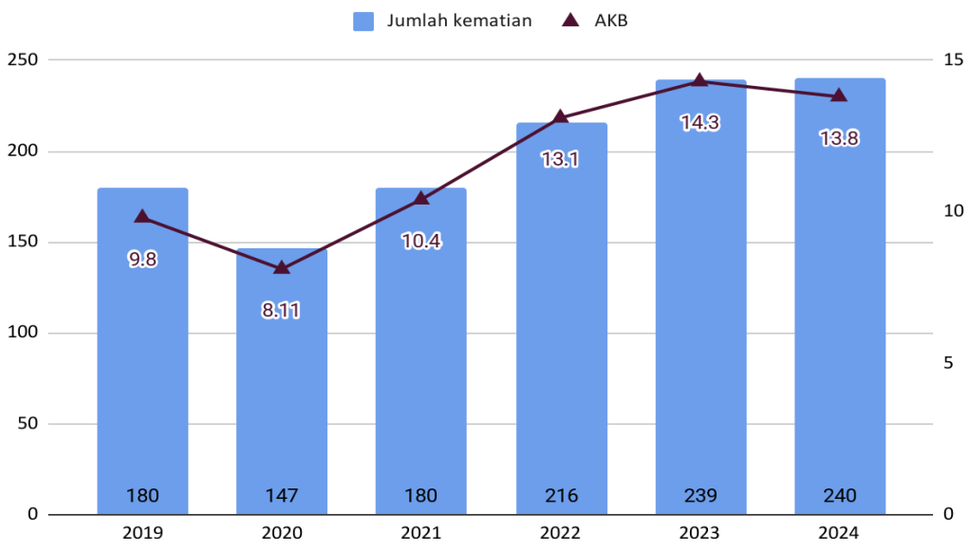


Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

**Gambar 2.10**
**Grafik Kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo**

Penyebab langsung kematian bayi pada tahun 2024 adalah Berat Badan Lahir Rendah dan prematuritas, Asfiksia, Kelainan Kongenital, Kelainan Kardiovaskular, Infeksi, dan penyebab lain-lain.

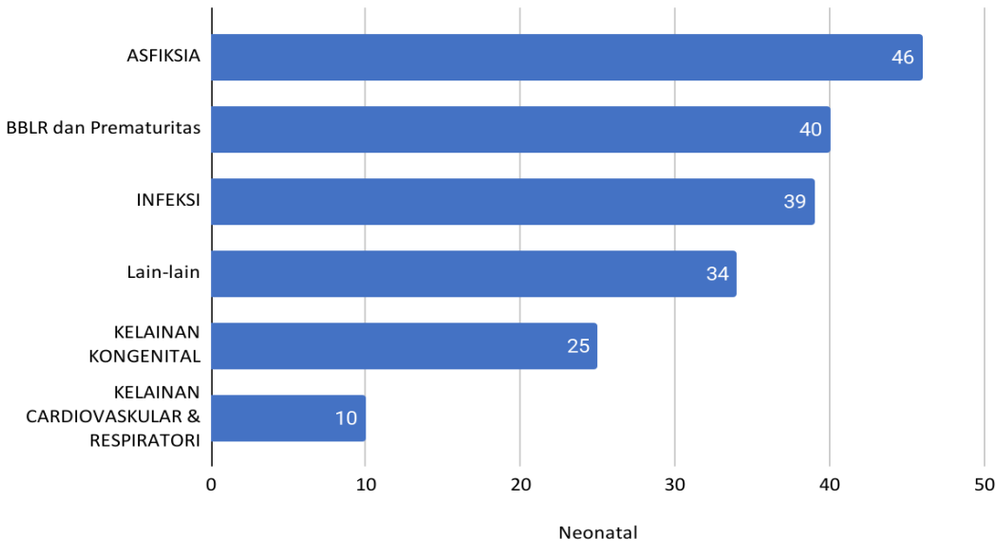


Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

**Gambar 2.11**
**Penyebab Kematian Neonatal (0-28 HARI) Tahun 2024**

Sedangkan penyebab tidak langsung dari kematian bayi adalah disebabkan karena faktor keterlambatan (3T) yaitu Terlambat Pengambilan keputusan, Terlambat Merujuk, Terlambat Mendapat penanganan. Penyebab Kematian Lain-lain pada post neonatal disebabkan oleh Aspirasi, trauma lahir, Acites, Hipoglikemi.

Angka Kematian Bayi dipengaruhi kondisi dimana tidak semua ibu hamil mempersiapkan kehamilannya dengan baik, dan Ibu Hamil Risiko Tinggi/Komplikasi yang ditemukan adalah sejumlah 3.993 orang ibu hamil komplikasi di tahun 2022. Deteksi Risiko Tinggi dan Penapisan Ibu Hamil merupakan skrining yang diperlukan dalam penanganan ibu hamil dengan risiko tinggi/komplikasi kehamilan yang dapat menyebabkan ibu melahirkan dengan bayi yang berisiko komplikasi. Bayi yang berisiko komplikasi harus mendapatkan penanganan kesehatan sedini mungkin di fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, tatalaksana bayi muda < 2 bulan dengan MTBM sangat diperlukan dalam deteksi dini komplikasi pada bayi khususnya neonatal. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menekan Kematian bayi adalah sebagai berikut:

- Penguatan kesehatan pada masa sebelum Hamil (Peningkatan Kesehatan Remaja, Calon Pengantin, Pasangan Usia subur yang belum memiliki anak)
- Monitoring dan Evaluasi ANC 10T dan pelayanan USG di Puskesmas.
- Pendampingan Ibu hamil Risiko Tinggi oleh Kader.
- Pelayanan persalinan aman di fasiltas kesehatan terstandar dan tenaga kesehatan yang kompeten.
- Peningkatan layanan kesehatan neonatal esensial: perawatan kanguru, ASI eksklusif, pencegahan infeksi, dan rujukan cepat untuk kasus darurat.
- Pemenuhan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Lanjutan
- Akses dan sistem rujukan: perlu transportasi darurat, layanan mobile/poskesdes, serta fasilitas kesehatan yang menjangkau wilayah terpencil.
- Peningkatan Kompetensi Tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer dalam tata laksana kegawatan neonatal, pelatihan standar neonatal, audit kematian bayi, dan perbaikan pencatatan/pelaporan.
- Pendekatan gizi dan edukasi masyarakat: pemberian suplementasi ibu hamil, dukungan ASI, serta kampanye tanda bahaya bayi.

**d. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup**

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting derajat kesehatan masyarakat. Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) bukan karena kecelakaan,

tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan kehamilan dan melahirkan. Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melakukan pelatihan tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kerjasama lintas sektor dan lintas program serta peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang dilaksanakan di Posyandu.

Angka kematian ibu dipengaruhi oleh kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pendidikan atau pengetahuan ibu maternal, status gizi dan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2024, Angka Kematian Ibu mencapai 103,56 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 137,6/100.000 Kelahiran Hidup. Jumlah kematian ibu tahun 2024 adalah 18 orang dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 17.449 kelahiran.

Untuk lebih mengetahui tingkat perkembangan angka kematian ibu maternal dari tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

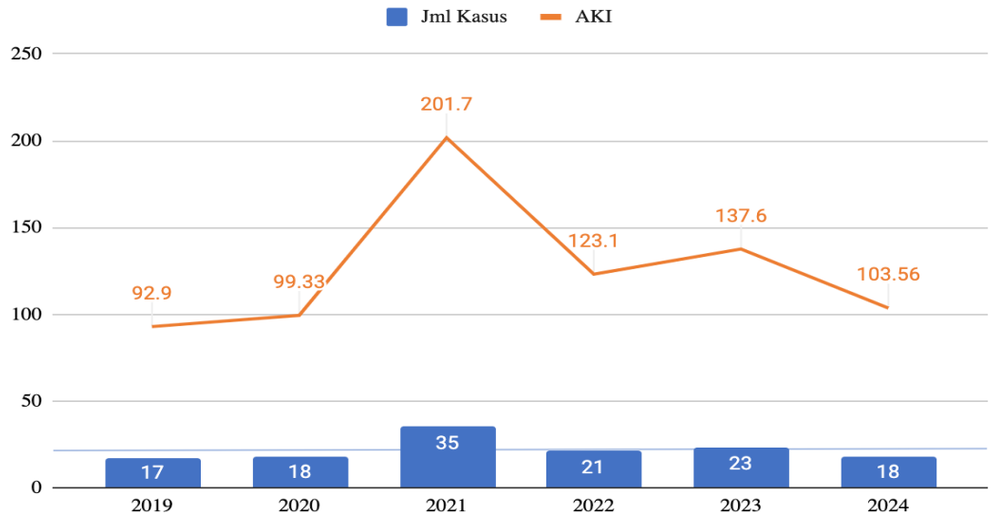


Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

**Gambar 2.12**
**Tren Kematian Ibu Maternal di Kabupaten Probolinggo**

Kematian ibu di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 disebabkan antara lain karena Hipertensi, Pendarahan, Kelainan Jantung, Emboli air Ketuban dan penyebab lain yakni Solusio Plasenta, Pneumonia, Asmatikus, DBD, Kanker Payudara, Epilepsi, dan Hypertiroid. Penyebab langsung kematian ibu pada tahun 2024 adalah seperti gambar berikut ini:

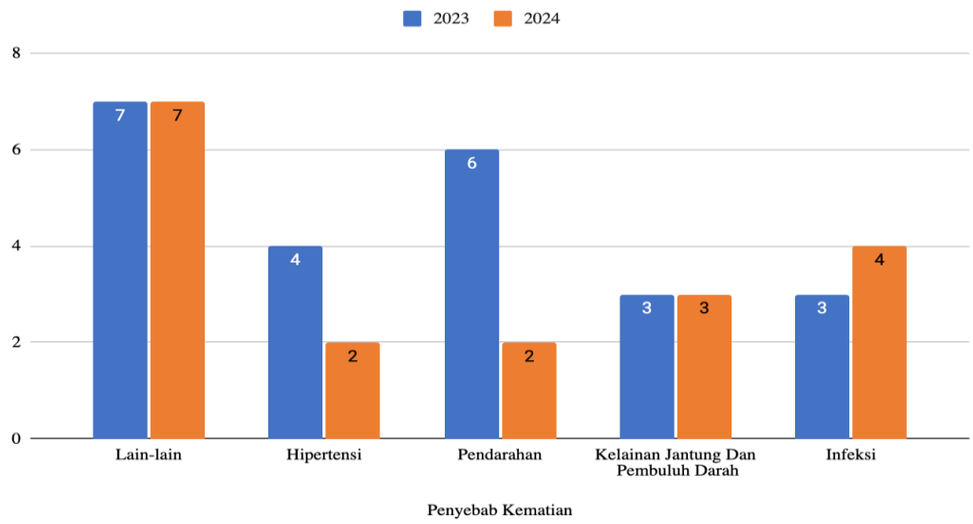


Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

**Gambar 2.13**
**Penyebab Langsung Kematian Ibu di Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 – 2024**

Selaras dengan penurunan angka kematian ibu, usia harapan hidup (UHH) di Kabupaten Probolinggo juga menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan publikasi resmi "Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2024" oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, usia harapan hidup di kabupaten ini naik dari 73,22 tahun pada 2022 menjadi 73,80 tahun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, termasuk akses dan mutu layanan kesehatan yang lebih baik.

Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu sangat ditentukan oleh kesiapan fisik ibu hamil, kualitas pelayanan ibu hamil, penanganan komplikasi kebidanan, penolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan pelayanan ibu nifas yang berkualitas. Untuk mendorong percepatan penurunan AKI, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

- Pelayanan Gizi pada remaja dengan pemberian tablet Tambah Darah (FE) dan penggalangan sarapan bersama disertai pemeriksaan Hemoglobin.
- Pelayanan kesehatan dan Skrining untuk calon Pengantin dalam deteksi dini Ibu Layak Hamil.
- Pelayanan kesehatan Pasangan Usia Subur dengan skrining ALKI (Anemia, Lila, Penyakit Kronis, Infeksi Menular Seksual) dalam deteksi Ibu layak hamil.
- Pemantapan kesiapan pelayanan kesehatan ibu hamil yang bermutu sesuai standar ANC 10T dan pelayanan USG di Trimester Pertama dan Trimester ke Tiga kehamilan.

- Penyamaan persepsi pelayanan alur rujukan dalam penanganan komplikasi dan gawat darurat.
- Peningkatan Kompetensi Tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer dalam tata laksana kegawatan maternal, audit kematian ibu, dan perbaikan pencatatan/pelaporan.

**e. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standard pelayanan antenatal, meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan dan tekanan darah, pemeriksaan tinggi fundus uteri, skrining status imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dan diberikan bila perlu, pengukuran LILA, penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin, pemeriksaan laboratorium (tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes HIV, Sifilis dan Hepatitis B. Tes lain sesuai indikasi seperti gluko-protein urin, gula darah sewaktu, tes feses kecacingan, pemeriksaan darah lengkap untuk deteksi dini talasemia) serta pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet pada ibu hamil selama masa kehamilannya, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling). Frekuensi *antenatal care* adalah minimal 4 kali selama kehamilan.

Cakupan K1 untuk mengukur akses ibu hamil pertama kali mendapatkan pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Probolinggo. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal dan kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. Cakupan K4 gambaran pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar selama kehamnilan minimal empat kali yaitu satu kali pada trimester pertama, satu jaki pada trimester kedua dan 2 kali pada trimester kerigas. Sedangkan Cakupan K6 adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, minimal enam kali kunjungan selama masa kehamilannya:

- minimal satu kali di triwulan pertama,
- minimal dua kali di triwulan kedua
- minimal tiga kali di triwulan ketiga

Pelayanan antenatal oleh dokter pada trimester pertama dengan usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau dari kontak pertama, dokter melakukan skrining kemungkinan adanya faktor risiko kehamilan atau penyakit penyerta pada ibu termasuk dalam pemeriksaan ultrasonografi (USG). Pelayanan antenatal oleh dokter pada trimester tiga dilakukan perencanaan persalinan,

termasuk pemeriksanaan ultrasonografi (USG) dan rujukan terencana bila diperlukan.

Indikator K6 menggambarkan tingkat perlindungan dan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil, sedangkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) indikator kinjerja pelayanan ibu hamil menggunakan K6. Gambaran capaian cakupan K1, K4 dan K6 di Kabupaten Probolinggo selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

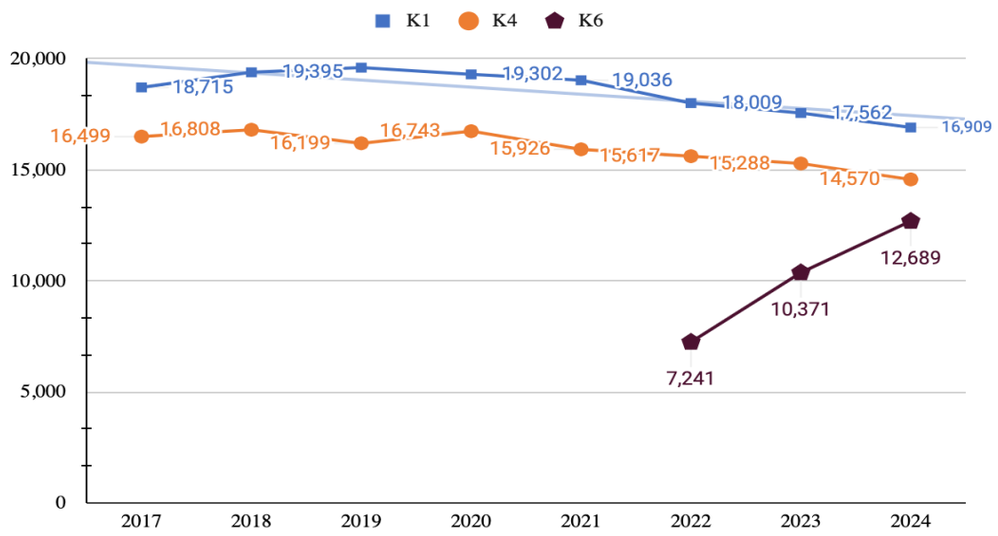


Sumber : Profil Kesehatan Kab. Probolinggo

**Gambar 2.14**
**Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1, K4, dan K6) di Kabupaten Probolinggo**

Dari Gambar 5.3 tampak capaian K6 sebesar 12.689 ibu hamil. Terdapat kesenjangan Cakupan K1 dan K4 di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 masih cukup besar yaitu 2.233 (13,8 %) Ibu Hamil. Hal ini dapat diartikan bahwa masih banyak ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal namun tidak meneruskan hingga ke-6 pada triwulan 3, atau pada kunjungan pertama tidak pada triwulan pertama, sehingga tidak terpantau kondisi kehamilannya.Kondisi tersebut berpeluang menyebabkan terjadinya kematian pada ibu melahirkan dan bayi yang dikandungnya. Hal tersebut dapat dicegah dengan adanya kelas ibu hamil untuk meningkatkan penyuluhan ke masyarakat melalui metode komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang tepat kepada ibu hamil dan keluarganya agar memeriksakan kehamilannya sesuai standar.

**f. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**

Upaya kesehatan ibu bersalin diwujudkan dalam upaya mendorong agar persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan

persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan, dimulai dari lahirnya bayi, pemotongan tali pusat sampai keluarnya plasenta. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten yaitu dokter, bidan, dan peawat, apabila keterbatasan akses dan tenaga medis persalianan dilakukan oleh minimal bidan-bidan, atau bidan-perawat di fasilitas pelayanan Kesehatan yang mampu melakukan tata laksanan awal penaganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Pelayanan persalinan harus memenuhi tujuh aspek yang meliputi:

- Membuat keputusan klinik;
- Asuhan sayang ibu dan sayang bayi, termasuk Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan resusitasi bayi baru lahir;
- Pencegahan Infeksi;
- Pencegahan penulran penyakit dari ibu ke anak;
- Persalinan bersih dan aman;
- Pencatatan atau rekam medis asuhan persalinan;
- Rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa persalinan. Hal ini antara lain disebabkan pertolongan persalinan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan.

Dari 18.177 persalinan yang ada di tahun 2024, persalinan yang dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 15.518 atau 85,4% dari total keseluruhan ibu bersalin.

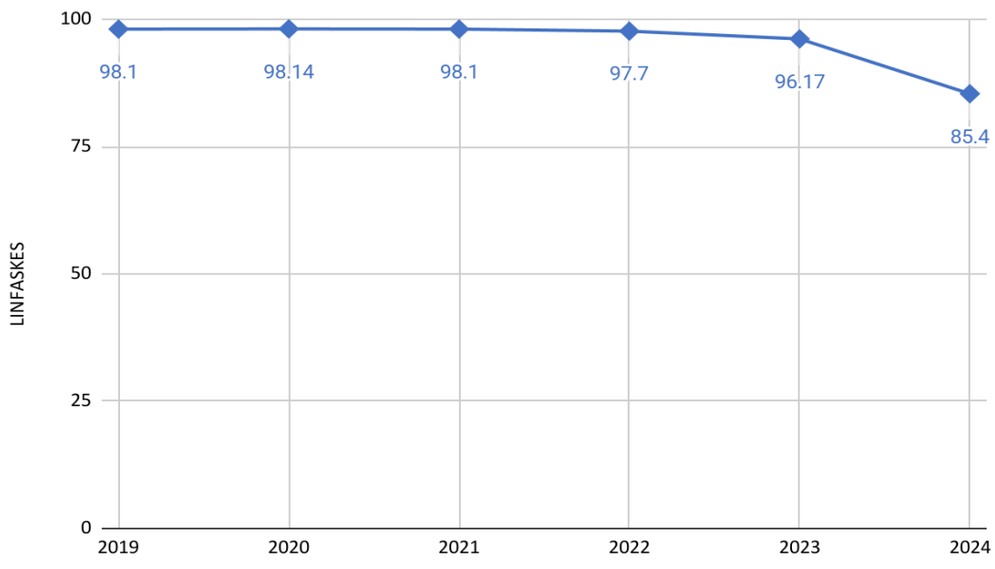


Sumber : Profil Kesehatan Kab. Probolinggo

**Gambar 2.15**
**Persentase Cakupan Persalinan di Fasyankes di Kabupaten Probolinggo**

**g. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar**

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi:

(1) Pelayanan kesehatan balita sehat.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

a. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
   - Penimbangan minimal 8 kali setahun.
   - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun.
   - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
   - Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
   - Pemberian imunisasi dasar lengkap.

b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
   - Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
   - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
   - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
   - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
   - Pemberian Imunisasi Lanjutan.

c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
   - Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
   - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
   - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
   - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

d. Pemantauan perkembangan balita.
e. Pemberian kapsul vitamin A.
f. Pemberian imunisasi dasar lengkap.
g. Pemberian imunisasi lanjutan.
h. Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
i. Edukasi dan informasi.

(2) Pelayanan kesehatan balita sakit.

Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)

Capaian tahun 2024 persentase pelayanan anak balita adalah sebesar 91,62% dengan angka riil pelayanan anak balita adalah 64.065 anak.

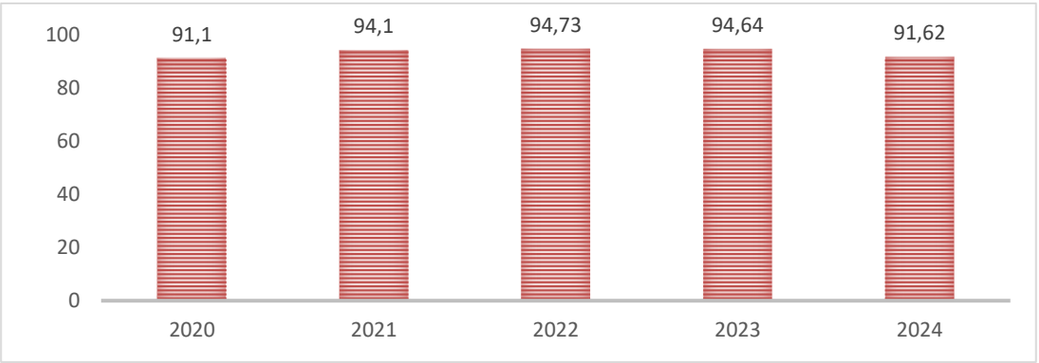


Sumber : Profil Kesehatan Kab. Probolinggo

**Gambar 2.16**
**Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di Kabupaten Probolinggo**

**h. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi:

(1) Skrining kesehatan.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia Pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- Penilaian status gizi.
- Penilaian tanda vital.
- Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- Penilaian ketajaman indera.

(2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

- Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
- Melakukan rujukan jika diperlukan

- Memberikan penyuluhan kesehatan

Capaian indikator pemeriksaan kesehatan siswa usia pendidikan dasar di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 terealisasi sebesar 96.2%. Artinya masih terdapat murid kelas 1 SD/setingkat, kelas 7, dan kelas 10 belum mendapat pemeriksaan kesehatan/skrening kesehatan minimal 4 kali setahun oleh tenaga kesehatan. UKS adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di Sekolah. Sedangkan guru UKS adalaah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS di sekolah dan telah dilatih tentang UKS.

Permasalahan dalam kegiatan penjaringan usia pendidikan dasar adalah kualitas pemeriksaan (screening) belum maksimal, belum ada tindak lanjut terhadap hasil screening, serta kerjasama dengan lintas sektor belum maksimal. Perlu meningkatkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Sekretariat Tetap (Sektap), UKS tingkat Kecamatan perlu dimaksimalkan, dan penyuluhan akan pentingnya UKS kepada warga sekolah.

**i. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi:

(1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM

(2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.
Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
- Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
- Pengukuran tekanan darah.
- Pemeriksaan gula darah.
- Anamnesa perilaku berisiko.

Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
- Melakukan rujukan jika diperlukan.

- Memberikan penyuluhan kesehatan.

Di Kabupaten Probolinggo pelayanan pada usia produktif dilaksanakan melalui kegiatan posbindu, skrining anak usia 15 tahun ke atas di sekolah dan Penjaringan di Puskesmas. Jumlah orang usia produktif yang dilakukan skrining adalah 566.951 atau 75% dari total sasaran 756.224.

Hambatan dalam pencapaian skrining penduduk usia produktif di Kabupaten Probolinggo antara lain:

- Pelaporan yang belum tersusun dengan baik, masih adanya beberapa data yang double entry atau data yang belum terekap di jejaring atau jaringan Puskesmas.
- Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk hadir pada Posbindu atau kegiatan pemerikasaan skrining yang dilakukan oleh Puskesmas atau tenaga kesehatan. Pengetahuan masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui deteksi dini penyakit juga masih rendah.
- Sarana dan Prasarana Penunjang seperti Posbindu Kit belum tersedia di semua Posbindu.

**j. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**

Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kesehatan lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia yang berkualitas melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain meningkatkan upaya kesehatan bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan Pelayanan Santun lanjut usia, meningkatkan upaya rujukan kesehatan bagi lanjut usia melalui pengembangan Poliklinik Geriatri Terpadu di Rumah Sakit, dan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi lanjut usia.

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut menjadi salah satu indikator yang harus dicapai dalam Standar Pelayanan Minimal. Hal ini menegaskan bahwa Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas harus mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut dapat dilaksanakan melalui posyandu lansia, kegiatan skrining di Puskesmas dan kegiatan Posbindu PTM dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
b. Pengukuran tekanan darah
c. Pemeriksaan gula darah
d. Pemeriksaan gangguan mental
e. Pemeriksaan gangguan kognitif
f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut.

Di Kabupaten Probolinggo jumlah penduduk usia lebih dari 60 tahun adalah 168.879 dan penduduk usia 60 keatas yang mendapatkan pelayanan di kabupaten Probolinggo tahun 2024 sebanyak 162.972 atau 96,5%. Angka ini masih di bawah angka SPM yang menyebutkan bahwa 100% penduduk usia 60 tahun ke atas mendapat pelayanan sesuai standar. Skrining pada lansia didukung dengan ketersediaan posyandu lansia yang ada di masing – masing desa. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya pelayanan kesehatan pada usia lanjut antara lain:

- Akses menuju ke pelayanan atau posyandu lansia yang sulit dijangkau. Beberapa lanjut usia tidak mampu untuk berjalan atau mendatangi tempat fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas ataupun Posyandu, sehingga perlu keaktifan dari kader atau tenaga kesehatan untuk melakukan jemput bola.
- Sarana prasarana yang belum tersedia di masing – masing posyandu. Pihak Puskesmas diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasrana yang lebih lengkap dalam program posyandu lansia guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia.
- Kurangnya peran masyarakat dan keluarga dalam mendukung posyandu lansia. Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan terutama keaktifan kader posyandu dan dukungan keluarga. Dukungan keluarga berperan dalam mendorong minat dan kesediaan lansia untuk mengikuti kegiatan Posyandu Lansia. Keluarga bisa menjadi motivator kuat bagi lansia apabila selalu menyediakan diri untuk mendampingi atau mengantar lansia ke posyandu, mengingatkan lansia jika lupa jadwal posyandu dan berusaha membantu mengatasi segala permasalahan bersama lansia.

**Tabel 2.13**
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo**

| Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggararan Tahun ke- | | | | | Rasio Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 27.634.911.391 | | | | | 24.584.353.720 | | | | | 88,96 | | | | | -100 | -100 |
| Program Pembinaan Lingkungan Sosial | 35.557.842.977 | | | | | 30.967.459.041 | | | | | 87,09 | | | | | -100 | -100 |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit | 4.151.368.339 | | | | | 3.867.308.936 | | | | | 93,16 | | | | | -100 | -100 |
| Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan | 28.496.364.954 | | | | | 25.205.373.011 | | | | | 88,45 | | | | | -100 | -100 |
| Program Bantuan Operasional Kesehatan | 28.124.591.890 | | | | | 19.763.440.477 | | | | | 70,27 | | | | | -100 | -100 |
| Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 15.111.586.769 | | | | | 8.912.036.047 | | | | | 58,97 | | | | | -100 | -100 |
| Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | 5.587.674.900 | | | | | 4.117.841.766 | | | | | 73,70 | | | | | -100 | -100 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 268.961.037.054 | 354.349.826.366 | 277.725.753.540 | 367.820.017.485 | | 222.389.032.456 | 278.683.240.708 | 260.000.000.000 | 337.863.069.531 | | 82,68 | 78,65 | 93,62 | 91,86 | 8,14 | 11,02 |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | 135.270.088.949 | 127.509.736.492 | 149.078.055.989 | 189.324.038.476 | | 85.481.732.806 | 98.422.260.576 | 112.000.000.000 | 174.477.110.542 | | 63,19 | 77,19 | 75,13 | 92,16 | 8,77 | 19,53 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | 27.088.195.922 | 10.336.610.000 | 13.538.676.605 | 17.209.589.763 | | 20.002.387.400 | 8.259.645.937 | 4.200.000.000 | 10.335.368.081 | | 73,84 | 79,91 | 31,02 | 60,06 | -10,72 | -15,22 |
| Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | | 209.492.000 | 258.542.000 | 446.040.000 | 604.458.200 | | 90.152.141 | 85.178.331 | 440.000.000 | 404.188.800 | | 43,03 | 32,95 | 98,65 | 66,87 | 30,33 | 45,51 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | | 4.319.426.100 | 4.406.198.500 | 1.215.719.571 | 1.422.376.250 | | 3.348.978.700 | 2.087.538.908 | 600.000.000 | 1.150.638.750 | | 77,53 | 47,38 | 49,35 | 80,90 | -24,25 | -23,44 |

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:

a. Tantangan
   1) Pelaksanaan dan pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional menuju *Universal Health Coverage* (UHC) baik dari aspek kepesertaan, pembiayaan, paket manfaat, kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta pengaturan sistem rujukan.
   2) Distribusi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan belum merata.
   3) Tingkat kelahiran tinggi, sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
   4) Anggaran yang cenderung meningkat dari berbagai sumber dana bila tidak diikuti dengan perencanaan program yang memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan menjadi tidak efektif dan efisien.
   5) Peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan formal dalam berbagai lembaga pendidikan kesehatan maupun pelatihan harus diikuti dengan follow up dan monitoring serta evaluasi pasca pelatihan.
   6) Pertambahan jumlah sarana penunjang pelayanan kesehatan baik gedung/ bangunan, alat-alat kesehatan dan perbekalan semakin meningkat harus dikelola dengan baik, terpelihara dan dievaluasi pemanfaatannya.
   7) Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi secara baik dan data yang ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

b. Peluang
   1) Komitmen pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah kesehatan dengan melibatkan multi sektoral pada level daerah;
   2) Terdapat beberapa sumber dana yang dimandatorikan penggunaannya di bidang Kesehatan menjadi peluang untuk meningkatkan akses pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang optimal.
   3) Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan pembangunan Kesehatan.
   4) Kemudahan akses komunikasi, informasi dan teknologi.

## 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan Pemerintahan bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.14**
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan**

| No. | Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1 | Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh serta permasalahan nasional gizi seperti masih tingginya kasus stunting; | - Masih ada potensi resiko peningkatan prevalensi stunting dari BBLR<br>- Masih ada permasalahan weight faltering dan underweight<br>- Masih Tingginya Ibu Hamil dengan Anemia<br>- Masih Tingginya Ibu Hamil KEK<br>- Tingginya Remaja Anemia terutama pelajar di pondok pesantren<br>- Rendahnya pengetahuan remaja tentang konsumsi gizi seimbang | - Kurangnya tenaga gizi di wilayah kerja puskesmas<br>- Cakupan ASI eksklusif rendah dan tingginya konsumsi air gula pada balita<br>- Belum mendapatkan informasi pentingnya konsumsi TTD (Tablet Tambah darah)<br>- Sebagian remaja tidak terbiasa sarapan, terutama remaja putri<br>- Pemilihan makanan yang beraneka ragam (protein hewani) masih rendah |
| 2 | Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi | - Skrining layak hamil belum menyeluruh<br>- Sebagian ibu hamil belum mengikuti kelas ibu hamil<br>- Tingginya gap antara K1 murni dan K1 akses<br>- Sebagian ibu hamil belum mendapatkan pelayanan sesuai standar | - PUS (Pasangan Usia Subur) belum semua melakukan skrining layak hamil<br>- Kurangnya partisipasi keluarga dalam kelas ibu hamil<br>- Adanya Budaya periksa kehamilan setelah terasa adanya gerakan bayi (trimester 2)<br>- Kompetensi tenaga pemberi layanan yang baru masih belum standar<br>- Pelaksanaan AMPSR belum maksimal<br>- Penolakan rujukan pasien tidak mampu karena alasan biaya hidup |
| 3 | Masih Tinggi Angka Kesakitan | - Rendahnya cakupan desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) / 5 pilar (Bebas BABS, CTPS, Pengelolaan air minum RT dan Pengamanan makanan RT, Pengelolaan sampah RT, Pengelolaan limbah air)<br>- Rendahnya persentase rumah tangga sehat (10 indikator PHBS RT: persalinan nakes, ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita, CTPS, air bersih, jamban sehat, PSN, konsumsi buah dan sayur, aktifitas fisik, tidak merokok dalam ruangan) | - Kurangnya tenaga sanitarian di wilayah kerja puskesmas<br>- Belum optimalnya tindak lanjut dari pemicuan yang sudah dilakukan petugas<br>- Dukungan stakeholder (desa, kecamatan) kurang<br>- Saluran edukasi (medsos, media cetak) terhadap kesehatan ke masyarakat kurang<br>- Kurangnya frekuensi diseminasi informasi ke masyarakat<br>- Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat untuk menjadikan sanitasi sebagai kebutuhan |

| No. | Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | - Cakupan imunisasi rutin pada bayi masih rendah, kalaupun tinggi di Pusk tetapi tidak merata di seluruh desa/kelurahan<br>- Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular | - Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) berjalan tidak optimal<br>- Kegiatan evaluasi paska Posyandu untuk kunjungan rumah tidak dilakukan<br>- Ortu menolak imunisasi lanjutan karena merasa sudah lengkap saat usia bayi<br>- Edukasi Upaya preventif dan kuratif terkait penyakit degenerative kurang optimal<br>- Penemuan / deteksi dini penyakit menular dan tidak menular kurang optimal<br>- Kurangnya pemahaman tatalaksna penyakit menular dan tidak menular, terutama TL hasil skrining |
| | | Belum semua penduduk Kabupaten Probolinggo menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional | - Jaminan kesehatan belum menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat<br>- Masih banyak penduduk yang tidak memiliki persyaratan lengkap untuk bisa didaftarkan sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) |
| **4** | Jumlah, sebaran, dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata | - Masih belum terpenuhinya 13 tenaga kesehatan prioritas di sebagian besar puskesmas<br>- Masih belum menyeluruhnya peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan<br>- Belum terpenuhinya SDM Dokter Spesialis di rumah sakit | - Kebijakan yang membatasi rekrutmen pegawai<br>- Kuota formasi yang tersedia kurang mewakili jumlah kebutuhan tenaga<br>- Kurangnya minat dokter untuk mendaftar di Kabupaten Probolinggo<br>- Formasi yang disediakan merupakan tenaga fungsional, sedangkan kebutuhan tenaga administrasi juga belum terpenuhi<br>- Tenaga fungsional merangkap tugas administrasi<br>- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan (peningkatan kapasitas) SDMK |
| **5** | Pemenuhan sarana dan prasarana serta Peralatan pada fasilitas pelayanan dasar dan rujukan belum optimal | - Beberapa bangunan fasyankes belum memenuhi standar prototype<br>- Lambat/gagalnya proses pembangunan Fasyankes<br>- Peralatan Kesehatan yang ada di Puskesmas banyak yang tidak bisa termanfaatkan karena data kerusakan tidak terupdate di ASPAK | - Rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan belum dapat dilakukan karena sertifikat kepemilikan lahan<br>- Keterbatasan anggaran rehabilitasi<br>- Keterbatasan kompetensi teknis sipil bangunan di Dinas Kesehatan<br>- Petugas Operator Aspak yang sering berganti dan tidak ada serah terima informasi mengenai tata cara pengelolaan Alat Kesehatan. |
| **6** | Kemampuan Pengelolaan Anggaran BLUD kurang optimal | - Upaya peningkatan pendapatan melalui pengembangan Layanan kurang optimal | - Belum terdapat sistem terintegrasi untuk Pengelolaan anggaran BLUD<br>- Keterbatasan SDM di bidang pengelolaan keuangan<br>- Keterbatasan pemahaman SDM terkait Pengelolaan keuangan BLUD |

## 2.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

### a. Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Program RPJMD Kabupaten

Visi pembangunan daerah merupakan gambaran kondisi Kabupaten Probolinggo yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam jangka lima tahun ke depan. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah:

**"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE**
**(Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)"**

Visi Kabupaten Probolinggo menjadi dasar yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun misi yang menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan, memberikan arah yang jelas, sekaligus batasan pencapaian tujuan. Adapun misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yaitu:

1) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif (**SAE Pemerintahan**);
2) Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang Kreatif dan Inovatif di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Berbasis Desa dan Komunitas Untuk Menciptakan Lapangan Kerja dan Memberantas Kemiskinan (**SAE Ekonomi**);
3) Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar lainnya yang Terjangkau (**SAE Pendidikan dan Kesehatan**);
4) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah Basis Produksi, Daerah Terluar, Daerah Terpencil, serta Perwilayahan Industri secara Merata (**SAE Infrastruktur**);
5) Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas (**SAE Sosial**).

Misi pembangunan daerah yang telah dirumuskan menjadi landasan arah penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan perumusan tujuan dan sasaran yang jelas, terukur, serta relevan dengan tantangan dan peluang pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran ini kemudian dijabarkan melalui strategi yang menggambarkan cara

pencapaiannya, serta arah kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan keterpaduan, konsistensi, dan efektivitas pembangunan, sehingga setiap langkah yang ditempuh berkontribusi nyata terhadap terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

**Tabel 2.15**
**Cascading Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029 beserta Indikator dan Targetnya**

| Visi / Misi | Tujuan / Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Baseline | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **VISI: "Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing)"** | | | | | | | | | | |
| **1. MISI 1: SAE PEMERINTAHAN<br><br>Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif** | **1. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional** | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Indeks** | **81,9** | **82,4** | **82,9** | **83,4** | **83,9** | **84,4** | **85** |
| | a. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah | Nilai SAKIP | Nilai | 67,11 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
| | | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Indeks | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| | | Maturitas SPIP | Nilai | 3,117 | 3,137 | 3,157 | 3,177 | 3,197 | 3,217 | 3,237 |
| | b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN | Indeks Sistem Merit | Indeks | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,87 |
| | c. Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,45 | 4,51 | 4,55 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,5 | 90,00 | 91,00 |
| | | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 48,55 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| | d. Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Daerah | Indeks SPBE | Indeks | 3,51 | 3,92 | 3,95 | 3,97 | 3,98 | 3,99 | 4 |
| **2. MISI 2: SAE EKONOMI<br><br>Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang Kreatif dan Inovatif di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Berbasis Desa dan Komunitas** | **2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing dalam Upaya Memberantas Kemiskinan** | **Pertumbuhan Ekonomi** | **%** | **4,82** | **5,09** | **5,22** | **5,36** | **5,48** | **5,61** | **5,76** |
| | | **Tingkat Kemiskinan** | **%** | **16,45** | **15,15** | **13,85** | **12,55** | **11,25** | **9,95** | **8,65** |
| | a. Meningkatnya Investasi Daerah | Nilai Realisasi Investasi | Juta | 6.549.724, 40 | 1.570.755, 98 | 1.604.567, 13 | 1.639.178, 71 | 1.674.613, 38 | 1.710.894, 61 | 1.748.046, 77 |
| | b. Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah | Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | % | 1,58 | 1,85 | 2,11 | 2,38 | 2,64 | 2,91 | 3,17 |
| | | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 27,19 | 27,35 | 27,43 | 27,44 | 27,45 | 27,47 | 27,48 |
| | | Persentase PDRB Perdagangan | % | 4,11 | 4,67 | 5,23 | 5,78 | 6,34 | 6,9 | 7,46 |

| Visi / Misi | Tujuan / Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Baseline | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Untuk Menciptakan Lapangan Kerja dan Memberantas Kemiskinan** | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 1,57 | 1,84 | 1,9 | 1,95 | 2,01 | 2,06 | 2,12 |
| | c. Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 |
| | d. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif | Persentase Penurunan PPKS | % | 3,99 | 4,02 | 4,44 | 4,94 | 5,54 | 6,3 | 7,26 |
| **3. MISI 3: SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN** | **3. Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesejahteraan** | **Indeks Pembangunan Manusia** | **Indeks** | **70,55** | **71,86** | **72,56** | **73,47** | **74,37** | **75,38** | **76,44** |
| **Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar lainnya yang Terjangkau** | a. Meratanya Akses Pendidikan | Harapan Lama Sekolah | Indeks | 12,65 | 12,88 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,9 |
| | | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun | Nilai | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8 |
| | b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup | Tahun | 73,93 | 74,13 | 74,38 | 74,63 | 74,89 | 75,14 | 75,39 |
| | | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) | % | 11,83 | 9,61 | 9,2 | 8,79 | 8,38 | 7,97 | 7,56 |
| | c. Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda | Indeks Pembangunan Pemuda | Indeks | 55 | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | 56 | 56,2 |
| | d. Meningkatnya Kualitas Desa | Persentase Desa Mandiri | % | 32,31 | 34,77 | 37,23 | 39,69 | 42,15 | 44,62 | 47,08 |
| **4. MISI 4: SAE INFRASTRUKTUR** | **4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah** | **Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur** | **Indeks** | **72,7** | **75,50** | **76,14** | **76,72** | **77,31** | **77,94** | **78,60** |
| **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di** | a. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur | Indeks Infrastruktur Dasar | Indeks | 69,04 | 69,78 | 70,41 | 71,04 | 71,66 | 72,30 | 72,93 |

| Visi / Misi | Tujuan / Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Baseline | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Daerah Basis Produksi, Daerah Terluar, Daerah Terpencil, serta Perwilayahan Industri secara Merata** | b. Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien | Indeks Konektivitas Wilayah | Indeks | 67,99 | 68,46 | 69,20 | 69,53 | 69,93 | 70,53 | 71,23 |
| | c. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 61,56 | 74,77 | 74,85 | 74,93 | 75 | 75,08 | 75,16 |
| **5. MISI 5: SAE SOSIAL**<br><br>**Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas** | **5. Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal** | **Indeks Kesejahteraan Sosial** | **Indeks** | **0,5** | **0,51** | **0,52** | **0,54** | **0,56** | **0,58** | **0,6** |
| | | **Rasio Gini** | **Angka** | **0,339** | **0,334** | **0,329** | **0,324** | **0,319** | **0,314** | **0,309** |
| | a. Meningkatnya Kesetaraan Gender | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 86,86 | 87,46 | 87,81 | 88,16 | 88,51 | 88,86 | 89,21 |
| | b. Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Rentan, dan Disabilitas | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 61,19 | 63,08 | 64,98 | 66,98 | 68,82 | 70,77 | 72,75 |
| | | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Indeks | 44,91 | 48,07 | 53,64 | 57,51 | 60,77 | 66,11 | 68,6 |
| | | Persentase Disabilitas yang Berdaya (Bekerja di Sektor Formal) | % | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,2 |
| | | Prosentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD | % | 25,10 | 27,36 | 30,09 | 33,10 | 36,58 | 40,42 | 44,87 |
| | c. Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |

Dinas Kesehatan sebagai pelaksana urusan Bidang Kesehatan, mendukung dalam pelaksanaan **Misi 3 :** Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, **Kesehatan**, dan Kebutuhan Dasar lainnya yang Terjangkau (SAE Pendidikan dan **SAE Kesehatan)**, melalui program prioritas daerah:

1) **24 Jam mudah Berobat;**

   Untuk meningkatkan akses Layanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Probolinggo, yang berfokus pada layanan Kesehatan kedaruratan yang dapat diakses selama 24 jam termasuk untuk persalinan. Program ini akan menyediakan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang dapat diakses selama 24 jam, dengan membangun fasilitas kesehatan dan memperkuat jaringan transportasi medis di wilayah yang sulit dijangkau. Dengan 24 Jam Mudah Berobat, diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo dapat memperoleh akses kesehatan yang cepat, mudah, dan merata termasuk layanan Kesehatan Tingkat desa.

2) **Rekrutmen 500 tenaga kesehatan;**

   Untuk memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Probolinggo melalui rekrutmen 500 tenaga kesehatan baru yang akan ditempatkan di rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Program ini dilaksanakan dengan konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Mandiri, di mana puskesmas dan rumah sakit dapat mengelola operasional secara mandiri untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

   Kemitraan dengan perguruan tinggi juga akan dilakukan untuk memastikan proses rekrutmen, pelatihan, dan penempatan tenaga kesehatan berkualitas dan siap mengabdi di masyarakat. Melalui 500 Tenaga Kesehatan Baru – BLUD Mandiri, diharapkan tercipta peningkatan akses dan kualitas Layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini mengalami kesenjangan Layanan.

3) **KTP Kabupaten Probolinggo bisa berobat di Seluruh Indonesia;**

   Untuk memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi warga Kabupaten Probolinggo di mana pun berada. Melalui program ini, pemegang KTP Kabupaten Probolinggo akan mendapatkan fasilitas berobat di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia yang bekerja sama, tanpa perlu melalui prosedur administratif yang rumit.

   Program ini akan terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta melibatkan koordinasi dengan berbagai fasilitas kesehatan di tingkat nasional. Dengan KTP Probolinggo Bisa Berobat di Seluruh Indonesia, diharapkan masyarakat Kabupaten Probolinggo dapat merasa lebih aman

dan terjamin dalam hal akses kesehatan, baik di dalam maupun di luar daerah.

4) **Buaian Bunda : Gratis Layanan gizi bagi Ibu dan Anak Resiko Tinggi**

   Menyediakan layanan gizi gratis bagi ibu hamil dan anak dengan risiko tinggi di Kabupaten Probolinggo. Program ini dirancang untuk mencegah stunting, meningkatkan kesehatan ibu hamil, dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi melalui pemberian nutrisi yang optimal. Buaian Bunda akan menyediakan paket gizi khusus dan konsultasi nutrisi berkala yang mudah diakses di puskesmas dan posyandu.

   Dengan fokus pada ibu dan anak berisiko tinggi, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan keluarga sejak dini dan mendukung tumbuh kembang anak yang lebih sehat.

5) **Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**

   Program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi, kesehatan, dan produktivitas masyarakat, terutama bagi mereka yang berisiko mengalami masalah gizi seperti stunting.

   Dalam pelaksanaan MBG, Dinas Kesehatan berperan dalam sertifikasi *hygiene* dan sanitasi satuan pelayanan, inspeksi kesehatan lingkungan di tingkat satuan pelayanan, serta pemeriksaan kualitas sumber air bersih.

**b. Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam RPJMD 2025 – 2029 adalah "**Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045**". Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berperan dalam mendukung pelaksanaan misi keenam, yakni **Jatim Sehat**, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menetapkan Tujuan Jangka Menengah "**Meningkatnya akses layanan kesehatan yang berkualitas**" dengan Sasaran yakni **Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata**.

Dalam rangka mengawal keberhasilan terwujudnya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas, maka ditetapkan strategi Jatim Sehat yaitu **Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dengan fokus pembangunan melalui Pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan sesuai kondisi wilayah**.

**c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rancangan RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045 telah memberikan arahan tentang pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten sesuai dengan potensi dan kaidah yang berlaku. Fokus arahan RTRW yang menjadi perhatian dan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah pada penetapan lokasi kawasan-kawasan strategis maupun zonasi lainnya, khususnya pada indikasi program yang akan diimplementasikan pada periode tahun tersebut. Rencana Kawasan Strategis, Khususnya Strategis Kepentingan EKONOMI menjadi acuan untuk perencanaan yang THIS (tematik, holistik, Integratif dan Spasial) di masa mendatang untuk percepatan pembangunan ekonomi kabupaten. Sementara itu, Rencana zonasi lainnya menjadi acuan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan merata di seluruh wilayah kabupaten. Penyediaan infrastruktur/sarana prasarana ini tentunya juga termasuk infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan untuk memastikan kebutuhan akses kesehatan pada pengembangan rencana kawasan strategis sesuai arahan pada dokumen RTRW.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten pada Rancangan RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045 adalah “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo sebagai sentra komoditas pertanian yang berdaya saing dengan mengembangkan agropolitan serta minapolitan yang didukung oleh Industri dan pariwisata”. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, beberapa hal yang dapat menjadi kontribusi bidang kesehatan pada Kawasan Agropolitan, Minapolitan, Industri, dan Pariwisata antara lain:

1) Penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar;
2) Penyediaan Layanan kesehatan bergerak (*mobile clinic*) untuk menjangkau desa-desa terpencil;
3) Optimalisasi sistem rujukan rumah sakit terintegrasi regional agar akses cepat bila terjadi kecelakaan kerja atau penyakit serius;
4) Penyediaan klinik wisata, kesiapsiagaan bencana di kawasan wisata, serta pengawasan makanan-minuman di destinasi wisata;
5) Optimalisasi program kesehatan kerja, Pencegahan penyakit akibat pestisida, penanganan penyakit zoonosis, serta perlindungan nelayan dari risiko kerja di laut;
6) Peningkatan sanitasi lingkungan di kawasan pertanian dan pesisir untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan (diare, leptospirosis, malaria, DBD);

7) Promosi kesehatan berbasis komunitas: edukasi gizi, pola hidup bersih, dan pencegahan penyakit menular;
8) Pemberdayaan kader kesehatan desa untuk mendukung ketahanan pangan dan kesehatan keluarga petani/nelayan.

**d. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Isu strategis dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 meliputi:

1) Pengelolaan sampah yang kurang optimal;
2) Pengelolaan sumber daya air yang kurang optimal;
3) Kerentanan bencana dan dampak perubahan iklim;
4) Potensi degradasi ekosistem;
5) Tingkat kemiskinan, sumber daya Manusia, dan daya saing daerah yang rendah;
6) Tata Kelola dan pelayanan pemerintah yang belum optimal;
7) Tingkat Pembangunan infrastruktur wilayah yang rentan.

Secara eksplisit, isu terkait kesehatan tidak masuk dalam isu strategis pada KLHS, namun demikian beberapa isu di atas jika tidak segera ditangani dapat menjadi potensi masalah pada bidang kesehatan seperti timbulnya penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat karena pengelolaan sampah yang kurang optimal. Kerentanan bencana dan dampak perubahan iklim menjadi salah satu dasar dalam pengembangan kompetensi tenaga kesehatan serta penyiapan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan jika terjadi bencana.

Meskipun tidak menjadi salah satu isu strategis, pencapaian Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Lingkungan pada SDG’s tetap menjadi salah satu fokus dalam Pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Probolinggo, yang meliputi:

1) Tujuan 1 **Tanpa Kemiskinan**, melalui:
   - Penyediaan jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

- Pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan
- Pelayanan imunisasi pada anak usia 12-23 tahun

2) Tujuan 2 **Tanpa Kelaparan**, melalui:
   - Peningkatan status gizi balita dan ibu hamil
3) Tujuan 3 **Kehidupan Sehat dan Sejahtera**, melalui:
   - Pelayanan kesehatan ibu dan anak
   - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
   - Penyediaan jaminan kesehatan (JKN)
   - Penyediaan obat dan vaksin di puskesmas
   - Pemenuhan tenaga kesehatan
4) Tujuan 6 **Air Bersih dan Sanitasi Layak**, melalui:
   - Pemicuan desa STBM

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.16**
**Isu Strategis Dinas Kesehatan**

| Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD | | | Isu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Terdapat 33 puskesmas yang tersebar di 24 kecamatan;<br>2. Pemkab telah menetapkan Peraturan Bupati No. 34/2023 tentang UHC;<br>3. Terdapat lebih dari 40 inovasi unggulan, termasuk sistem informasi kesehatan, layanan berbasis digital, dan edukasi masyarakat;<br>4. Wilayah rawan bencana (vulkanik, banjir, gempa) mendorong penguatan sistem tanggap darurat;<br>5. Penguatan sistem surveilans penyakit berbasis desa dan kecamatan;<br>6. Potensi kolaborasi dengan sektor pendidikan, lingkungan, dan sosial untuk pendekatan kesehatan holistic. | 1. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh serta permasalahan nasional gizi seperti masih tingginya kasus stunting;<br>2. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi<br>3. Masih Tinggi Angka Kesakitan<br>4. Jumlah, sebaran, dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata<br>5. Pemenuhan sarana dan prasarana serta Peralatan pada fasilitas pelayanan dasar dan rujukan belum optimal sesuai standar<br>6. Mutu pelayanan belum optimal<br>7. Kepuasan pasien & citra fasyankes belum maksimal<br>8. Kemampuan Pengelolaan Anggaran BLUD kurang optimal | 1. Pengelolaan sampah yang kurang optimal<br>2. Pengelolaan sumber daya air yang kurang optimal;<br>3. Kerentanan bencana dan dampak perubahan iklim;<br>4. Potensi degradasi ekosistem;<br>5. Tingkat kemiskinan, sumber daya Manusia, dan daya saing daerah yang rendah;<br>6. Tata Kelola dan pelayanan pemerintah yang belum optimal;<br>7. Tingkat Pembangunan infrastruktur wilayah yang rentan<br>8. Penyediaan jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan<br>9. Pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan<br>10. Pelayanan imunisasi pada anak usia 12-23 tahun | 1. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan semakin nyata, penyebaran penyakit tropis ke wilayah baru, peningkatan kasus penyakit pernapasan akibat polusi, dan gangguan ketahanan pangan<br>2. Pandemi dan Kesiapsiagaan Global: COVID-19 memicu reformasi sistem kesehatan global, mendorong investasi pada sistem surveilans, respons cepat, dan produksi vaksin lokal<br>3. Ketimpangan Akses Kesehatan: Negara-negara berkembang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, teknologi medis, dan tenaga kesehatan terlatih.<br>4. Digitalisasi dan AI dalam Kesehatan: Teknologi seperti AI, telemedicine, dan big data semakin diadopsi untuk meningkatkan | 1. Transformasi Sistem Kesehatan 2025–2029: Pemerintah Indonesia tengah menyusun roadmap reformasi kesehatan yang menekankan kolaborasi lintas sektor, penguatan layanan primer, dan teknologi kesehatan.<br>2. Kebijakan Inklusif dan Responsif: Forum Nasional Kesehatan 2025 menyoroti pentingnya kebijakan yang inklusif dan berdampak nyata, dengan fokus pada masyarakat sehat, layanan adil, dan pembiayaan efektif.<br>3. Integrasi Data dan Layanan: Upaya digitalisasi rekam medis, integrasi layanan BPJS, dan penguatan sistem informasi kesehatan menjadi prioritas.<br>4. Isu Gizi dan Penyakit Tidak Menular (PTM): Lonjakan kasus diabetes, hipertensi, dan obesitas menjadi perhatian, terutama di | 1. RPJPD 2025–2045: Kabupaten Probolinggo menetapkan arah pembangunan jangka panjang yang mencakup penguatan sektor kesehatan, tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat.<br>2. Tantangan Lokal: Masih terdapat kesenjangan layanan antara wilayah pesisir dan pegunungan, serta tantangan dalam penanganan stunting dan sanitasi lingkungan.<br>3. Kolaborasi Multi-Sektor: Pemerintah daerah mulai mengintegrasikan pendekatan lintas sektor - pendidikan, lingkungan, dan ekonomi - dalam strategi kesehatan | 1. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup dan lingkungan tidak sehat<br>2. Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Prevalensi Stunting yang masih tinggi<br>3. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak yang masih rendah<br>4. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah, jenis, maupun kompetensi SDM<br>5. Sistem rujukan pelayanan kesehatan masih belum optimal<br>6. Tingkat keaktifan peserta jaminan kesehatan masih belum optimal<br>7. Penetapan RSUD Waluyo Jati menjadi Rumah Sakit Jejaring Pengampuan |

| Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD | | | Isu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 11. Peningkatan status gizi balita dan ibu hamil<br>12. Pelayanan kesehatan ibu dan anak<br>13. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular<br>14. Penyediaan jaminan kesehatan (JKN)<br>15. Penyediaan obat dan vaksin di puskesmas<br>16. Pemenuhan tenaga kesehatan<br>17. Pemicuan desa STBM | efisiensi layanan dan prediksi penyakit. | wilayah urban dan semi-urban. | | Pelayanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi) dan Kesehatan Ibu dan Anak<br>8. Penguatan tata kelola berbasis BLUD pada fasilitas pelayanan kesehatan<br>9. Peningkatan kepuasan pasien & citra positif fasyankes di masyarakat<br>10. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo |

# BAB 3
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan mendukung pencapaian Misi ke-3, yaitu **Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar lainnya yang Terjangkau (SAE Pendidikan dan Kesehatan)** dan Tujuan Pembangunan Daerah ke-3, yaitu **Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesejahteraan** dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Sasaran atau kondisi yang diharapkan untuk mencapai tujuan ini salah satunya adalah **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**, dengan indikator kinerjanya adalah Usia Harapan Hidup. Sasaran tersebut selanjutnya diturunkan menjadi Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029. Untuk menunjang pencapaian Tujuan pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029, dirumuskan 2 sasaran meliputi:

1. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, dengan indikator kinerja:
   a. Angka Kematian Ibu
   b. Angka Kematian Balita
   c. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
   d. Angka populasi Bebas Penyakit Menular
   e. Angka populasi Bebas Penyakit Tidak Menular
   f. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan 80%
2. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah, dengan indikator:
   1) Persentase Kenaikan LHE AKIP PD

**Tabel 3.1**
**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 74,13 | 74,38 | 74,63 | 74,89 | 75,14 | 75,39 | |
| | | Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) | 98,08 | 92,94 | 87,73 | 82,45 | 77,09 | 71,65 | |
| | | | Angka Kematian Balita (Per | 14,94 | 14,41 | 13,86 | 13,31 | 12,75 | 12,18 | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | 1.000 Kelahiran Hidup) | | | | | | | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 22,28 | 21,48 | 20,68 | 19,88 | 17,14 | 16,42 | |
| | | | Angka populasi bebas penyakit menular (%) | 50 | 58,33 | 66,67 | 75 | 83,33 | 91,67 | |
| | | | Angka populasi bebas penyakit tidak menular (%) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| | | | Proporsi fasyankes yang 80% (%) | 97,14 | 94,44 | 94,44 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Tabel 3.2**
**Tujuan dan Sasaran Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)**
**Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDI-KATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| **RSUD Waluyojati** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi RSUD Waluyojati | 93,29% | 93,29% | 93,29% | 93,29% | 93,29% | 93,29% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM RSUD Waluyojati | 92,16 Indeks | 92,66 Indeks | 93,16 Indeks | 93,66 Indeks | 94,16 Indeks | 94,66 Indeks | |
| **RSUD Tongas** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi RSUD Tongas | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM RSUD Tongas | 86 Indeks | 88 Indeks | 90 Indeks | 92 Indeks | 95 Indeks | 95 Indeks | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDI-KATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| **Puskesmas Kuripan** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Kuripan | 77% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Kuripan | 93,78 Indeks | 94 Indeks | 95 Indeks | 96 Indeks | 97 Indeks | 97 Indeks | |
| **Puskesmas Bantaran** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Bantaran | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Bantaran | 83,9 Indeks | 85 Indeks | 86 Indeks | 87 Indeks | 88 Indeks | 90 Indeks | |
| **Puskesmas Leces** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Leces | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Leces | 93,45 Indeks | 94 Indeks | 95 Indeks | 96 Indeks | 97 Indeks | 98 Indeks | |
| **Puskesmas Jorongan** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Jorongan | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Jorongan | 91,66 Indeks | 92 Indeks | 93 Indeks | 94 Indeks | 95 Indeks | 96 Indeks | |
| **Puskesmas Tegalsiwalan** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Tegalsiwa-lan | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Tegalsiwa-lan | 86,75 Indeks | 91 Indeks | 93 Indeks | 94 Indeks | 95 Indeks | 95 Indeks | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDI-KATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| **Puskesmas Banyuanyar** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Banyuanyar | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Banyuanyar | 91,75 Indeks | 93 Indeks | 94 Indeks | 95 Indeks | 95 Indeks | 95 Indeks | |
| **Puskesmas Klenang Kidul** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Klenang Kidul | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Klenang Kidul | 94,35 Indeks | 95 Indeks | 96 Indeks | 97 Indeks | 98 Indeks | 99 Indeks | |
| **Puskesmas Tiris** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Tiris | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Tiris | 86,8 Indeks | 87 Indeks | 88 Indeks | 89 Indeks | 90 Indeks | 91 Indeks | |
| **Puskesmas Ranugedang** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Ranuge-dang | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Ranuge-dang | 88,85 Indeks | 90 Indeks | 92 Indeks | 94 Indeks | 95 Indeks | 96 Indeks | |
| **Puskesmas Krucil** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Krucil | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Krucil | 84,49 Indeks | 88 Indeks | 89 Indeks | 90 Indeks | 92 Indeks | 94 Indeks | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDI-KATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| **Puskesmas Wangkal** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Wangkal | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Wangkal | 93,5 Indeks | 93,6 Indeks | 93,7 Indeks | 93,8 Indeks | 93,9 Indeks | 94 Indeks | |
| **Puskesmas Condong** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Condong | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Condong | 87,04 Indeks | 88 Indeks | 89 Indeks | 90 Indeks | 91 Indeks | 92 Indeks | |
| **Puskesmas Pakuniran** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Pakuniran | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Pakuniran | 88,86 Indeks | 89 Indeks | 89,2 Indeks | 89,4 Indeks | 89,6 Indeks | 90 Indeks | |
| **Puskesmas Glagah** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Glagah | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Glagah | 87,26 Indeks | 88,99 Indeks | 90,99 Indeks | 93,99 Indeks | 94,99 Indeks | 95,99 Indeks | |
| **Puskesmas Kotaanyar** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Kotaanyar | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Kotaanyar | 98,86 Indeks | 98,86 Indeks | 98,86 Indeks | 98,86 Indeks | 98,86 Indeks | 98,86 Indeks | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDI-KATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| **Puskesmas Paiton** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Paiton | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Paiton | 95 Indeks | 95 Indeks | 95 Indeks | 95 Indeks | 95 Indeks | 95 Indeks | |
| **Puskesmas Jabungsisir** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Jabungsisir | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Jabungsisir | 86,37 Indeks | 86,50 Indeks | 88,60 Indeks | 88,65 Indeks | 86,66 Indeks | 86,70 Indeks | |
| **Puskesmas Besuk** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Besuk | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Besuk | 88,57 Indeks | 88,59 Indeks | 88,63 Indeks | 88,65 Indeks | 88,68 Indeks | 88,7 Indeks | |
| **Puskesmas Bago** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Bago | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Bago | 84,04 Indeks | 84,5 Indeks | 85,05 Indeks | 86 Indeks | 86,5 Indeks | 87 Indeks | |
| **Puskesmas Kraksaan** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Kraksaan | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Kraksaan | 81,78 Indeks | 83,9 Indeks | 85 Indeks | 88 Indeks | 89 Indeks | 91 Indeks | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDI-KATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| **Puskesmas Krejengan** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Krejengan | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Krejengan | 86,5 Indeks | 87 Indeks | 88 Indeks | 88 Indeks | 88 Indeks | 89 Indeks | |
| **Puskesmas Pajarakan** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Pajarakan | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Pajarakan | 90,50 Indeks | 91 Indeks | 91 Indeks | 92 Indeks | 92 Indeks | 93 Indeks | |
| **Puskesmas Maron** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Maron | 80% | 85% | 85% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Maron | 91,81 Indeks | 92,05 Indeks | 93,06 Indeks | 94,07 Indeks | 95,08 Indeks | 96,09 Indeks | |
| **Puskesmas Suko** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Suko | 80% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Suko | 83,95 Indeks | 84,5 Indeks | 84,7 Indeks | 85,2 Indeks | 85,5 Indeks | 87 Indeks | |
| **Puskesmas Gending** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Gending | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Gending | 90 Indeks | 90 Indeks | 90 Indeks | 91 Indeks | 91 Indeks | 91 Indeks | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDI-KATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| **Puskesmas Dringu** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Dringu | 80% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Dringu | 84,97 Indeks | 86 Indeks | 90 Indeks | 90 Indeks | 92 Indeks | 94 Indeks | |
| **Puskesmas Wonomerto** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Wonomerto | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Wonomerto | 87,46 Indeks | 88 Indeks | 89 Indeks | 90 Indeks | 91 Indeks | 92 Indeks | |
| **Puskesmas Lumbang** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Lumbang | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Lumbang | 82,1 Indeks | 83 Indeks | 85 Indeks | 86,5 Indeks | 88,2 Indeks | 90 Indeks | |
| **Puskesmas Tongas** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Tongas | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Tongas | 94,41 Indeks | 95,2 Indeks | 95,7 Indeks | 96,1 Indeks | 96,3 Indeks | 96,5 Indeks | |
| **Puskesmas Curahtulis** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Curahtulis | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Curahtulis | 86,81 Indeks | 88 Indeks | 89 Indeks | 90 Indeks | 91 Indeks | 92 Indeks | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDI-KATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| **Puskesmas Sumberasih** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Sumberasih | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Sumberasih | 98,65 Indeks | 98,70 Indeks | 98,75 Indeks | 98,80 Indeks | 98,85 Indeks | 98,90 Indeks | |
| **Puskesmas Sukapura** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Sukapura | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Sukapura | 81,59 Indeks | 83 Indeks | 85 Indeks | 88 Indeks | 90 Indeks | 93 Indeks | |
| **Puskesmas Sumber** | | | | | | | | | | |
| **Sasaran RPJMD:** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat<br><br>**Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo:** Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Meningkat-nya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | | Nilai Akreditasi Puskesmas Sumber | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM Puskesmas Sumber | 89 Indeks | 90 Indeks | 91 Indeks | 92 Indeks | 93 Indeks | 94 Indeks | |

**Tabel 3.3**
**Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama (Tujuan dan Sasaran)**

| No | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PERHITUNGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **TUJUAN:**<br>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup (UHH) | Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.<br>UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. | Jumlah umur orang meninggal dibagi Jumlah orang meninggal |
| 2 | **SASARAN 1:**<br>Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | Angka Kematian Ibu | Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan komplikasi obstretik atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan | Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. |

| No | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PERHITUNGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. | |
| | | Angka Kematian Balita | Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama (termasuk kematian bayi) | Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 1000 |
| | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U). Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, di mana panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun dan tinggi badan digunakan untuk anak usia 2-5 tahun. Panjang badan/tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005.<br>Klasifikasi indikator PB/U atau TB/U yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak:<br>a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 SD<br>b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 SD s/d Zscore < -2,0 SD | Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). |
| | | Angka populasi Bebas Penyakit Menular | Persentase kecamatan yang cakupan ODHIV ditemukan dan mulai pengobatan ARV minimal 90%, serta angka keberhasilan pengobatan TBC > 90% | Jumlah kecamatan yang cakupan ODHIV ditemukan dan mulai pengobatan ARV minimal 90%, serta angka keberhasilan pengobatan TBC > 90% dibagi jumlah kecamatan dikali 100 |
| | | Angka populasi Bebas Penyakit Tidak Menular | Persentase kecamatan dengan capaian SPM Hipertensi dan Diabetes Mellitus paling kurang 80% | Kecamatan dengan capaian SPM Hipertensi dan Diabetes Mellitus paling kurang 80% dibagi jumlah total kecamatan dikali 100 |
| | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan 80% | Proporsi fasilitas Kesehatan (Puskesmas, RS, dan Labkesmas) dengan akreditasi paripurna | Jumlah fasilitas Kesehatan (Puskesmas, RS, dan Labkesmas) yang mendapatkan Nilai Akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029 dibagi Jumlah fasilitas Kesehatan yang teregistrasi dikali 100 |
| 3 | **SASARAN 2:**<br>Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP PD | Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan yang meliputi 4 komponen, yaitu:<br>1. Penilaian kualitas Perencanaan Kinerja | Kenaikan Nilai LHE AKIP tahun berjalan dibagi nilai LHE AKIP tahun sebelumnya dikali 100 |

| No | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PERHITUNGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2. Penilaian Pengukuran Kinerja<br>3. Penilaian Pelaporan Kinerja<br>4. Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | |
| 4 | **TUJUAN UOBK DAN UPT:**<br>Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | Nilai Akreditasi | Hasil penilaian terhadap penerapan Standar Akreditasi oleh Lembaga penyelenggara Akreditasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, meliputi:<br>1. Terakreditasi Paripurna<br>2. Terakreditasi Utama<br>3. Terakreditasi Madya<br>4. Terakreditasi Dasar<br>5. Tidak terakreditasi | Nilai Akreditasi didapatkan dari hasil penilaian pada masing-masing bab (jika ada), atau dari hasil konversi status akreditasi sebagai berikut:<br>1. Terakreditasi paripurna : 80%<br>2. Terakreditasi Utama : 77%<br>3. Terakreditasi Madya : 71%<br>4. Terakreditasi Dasar : 61%<br>5. Tidak terakreditasi : kurang dari 60%<br>(berdasarkan Keputusan Dirjen Yankes nomor HK.02.02/I/3991/2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi) |
| 5 | **SASARAN UOBK DAN UPT:**<br>Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Nilai IKM | Nilai IKM merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. IKM mencerminkan persepsi, pengalaman, dan penilaian pengguna layanan atas aspek-aspek pelayanan. | IKM dihitung berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat dengan menggunakan skala penilaian tertentu (misalnya skala 1–4 atau 1–5).<br>Formulasi perhitungan adalah sebagai berikut:<br>$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} X \text{ nilai penimbang}$<br>IKM = SKM Unit pelayanan x 25 |

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029, terutama dalam pembangunan kesehatan, diperlukan serangkaian strategi yang terarah, terpadu, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan kesehatan. Strategi-strategi ini disusun sebagai kerangka operasional untuk menjabarkan tujuan dan sasaran ke dalam langkah-langkah nyata yang dapat diukur dan dievaluasi secara berkala.

**Tabel 3.4**
**Penahapan Renstra Dinas Kesehatan**

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| Penguatan pondasi layanan kesehatan yang berkelanjutan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Puskesmas, Posyandu, serta fasilitas kesehatan rujukan, untuk mendukung daya saing daerah. | Percepatan pemerataan layanan kesehatan yang inklusif dengan dukungan teknologi informasi kesehatan serta penguatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit berbasis masyarakat dan inovasi. | Pemantapan kualitas infrastruktur dan SDM kesehatan, serta integrasi layanan kesehatan dengan sistem tata kelola pemerintah daerah yang responsif dan akuntabel, melalui penguatan sistem rujukan dan manajemen data kesehatan. | Pemantapan transformasi sosial di bidang kesehatan melalui peningkatan literasi kesehatan masyarakat, pengembangan layanan promotif-preventif, dan inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan yang berkualitas. | Perwujudan sistem layanan kesehatan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tata kelola pemerintah yang baik, didukung infrastruktur kesehatan modern dan sistem pendanaan yang efisien dan inklusif. |

Pendekatan strategis yang digunakan tidak hanya berfokus pada peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, tetapi juga mencakup penguatan sistem kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan mempertimbangkan indikator kinerja utama dan prioritas pembangunan daerah, strategi ini diharapkan mampu menjamin efektivitas pelaksanaan program serta keberlanjutan dampaknya terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

**Tabel 3.5**
**Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan**

| No | Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan, menyediakan kemudahan akses layanan kesehatan bagi semua masyarakat, yang didukung oleh Penyediaan Fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan kompeten | ▪ Pelaksanaan cek kesehatan gratis sesuai siklus hidup dan intervensinya<br>▪ Peningkatan kemandirian kesehatan pada Lansia<br>▪ Peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil<br>▪ Perbaikan status gizi remaja putri, ibu hamil, dan balita<br>▪ Peningkatan cakupan imunisasi sesuai kelompok sasaran<br>▪ Peningkatan penemuan dan pengobatan penyakit menular (TB, HIV, DBD, Kusta)<br>▪ Pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular<br>▪ Peningkatan kampanye perilaku dan gaya hidup sehat<br>▪ Penguatan sistem Pengawasan keamanan pangan<br>▪ Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat kesehatan di fasyankes<br>▪ Peningkatan kompetensi layanan rumah sakit untuk mendukung penguatan RS jejaring pengampuan pelayanan KJSU dan KIA<br>▪ Pemenuhan Tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasyankes<br>▪ Peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasyankes | |

| No | Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| | | | ▪ Peningkatan cakupan pembiayaan jaminan kesehatan<br>▪ Penguatan tata Kelola, data, dan informasi kesehatan<br>▪ Penguatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat dalam sektor kesehatan<br>▪ Peningkatan kualitas Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja<br>▪ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan<br>▪ Peningkatan kualitas pengelolaan BMD<br>▪ Peningkatan kualitas pegelolaan kepegawaian<br>▪ Fasilitasi kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah<br>▪ Peningkatan kualitas pengelolaan BLUD | |

# BAB 4
# PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

## 4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Program dan kegiatan Dinas Kesehatan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran.

**Tabel 4.1**
**Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kesehatan**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | | | | Usia Harapan Hidup (UHH) | | |
| | | Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | | | 1. Angka Kematian Ibu (AKI)<br>2. Angka Kematian Balita<br>3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita<br>4. Angka populasi bebas penyakit menular<br>5. Angka populasi bebas penyakit tidak menular<br>6. Proporsi fasyankes yang 80% | | |
| | | | Meningkatnya kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Lanjutan | | Persentase Pemenuhan SPA RSUD | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana RSUD | Persentase pemenuhan Sarana & prasarana RSUD | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | |
| | | | | | | 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | |
| | | | | | | 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit | |
| | | | | | Persentase Puskesmas yang memenuhi rasio Puskesmas terhadap populasi | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya pemenuhan sarana dan parasarana Puskesmas dan Faskes Lainnya | Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas | |
| | | | | | | 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | |
| | | | | | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | |
| | | | | | | 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | |
| | | | | | Proporsi Fasilitas Kesehatan yang terpenuhi Alat Kesehatan sesuai standar | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya pemenuhan alat kesehatan di Fasyankes | Persentase pemenuhan alat kesehatan di Fasyankes | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | |
| | | | | | | 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | |
| | | | | | Persentase fasilitas kesehatan primer yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya pemenuhan obat dan vaksin di Puskesmas | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | |
| | | | | | | 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya fasyankes yang terdaftar ke SIKN | Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | |
| | | | | | | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | |
| | | | | | Persentase fasyankes yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Izin Operasionalnya Berlaku | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Izin Operasionalnya berlaku | 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | |
| | | | | | | 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | |
| | | | | | | 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | |
| | | | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | | Persentase Capaian SPM RS | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Meningkatnya pelayanan BLUD RSUD sesuai standar | Jumlah lindikator capaian SPM yang memenuhi standart | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | | | | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| | | | | | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | | | | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | |
| | | | | | Persentase anemia pada ibu hamil | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase remaja putri diskrining anemia | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | |
| | | | | | Jumlah Kematian Bayi | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | |
| | | | | | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | |
| | | | | | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | |
| | | | | | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | |
| | | | | | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | |
| | | | | | Persentase desa mencapai target STBM | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | Persentase Hipertensi dalam pengendalian | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | |
| | | | | | Persentase Diabetes dalam pengendalian | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | |
| | | | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase puskesmas dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis > 80% | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | |
| | | | Menguatnya sistem kesehatan | | Persentase cakupan JKN | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya Jangkauan Pembiayaan Kesehatan | Cakupan kepesertaan aktif JKN | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Persentase kelompok asuhan mandiri yang mendukung program prioritas | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | |
| | | | | | Persentase Fasyankes yang terpenuhi kebutuhan operasionalnya | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | |
| | | | | | Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Persentase puskesmas yang memiliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | |
| | | | Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan | | 6. Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi<br>7. Persentase SDMK Rumah Sakit sesuai standar | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | |
| | | | | Meningkatnya Tenaga Kesehatan yang memiliki Izin Praktik | Persentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktik | 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | |
| | | | | Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar | Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | | | | | | 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | |
| | | | | | | 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Meningkatnya mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan | Persentase named nakes yang ditingkatkan mutunya | 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Meningkatnya kepatuhan sarana apotek, toko obat, toko alkes, optikal, dan PKRT dalam pemenuhan standar dan komitmen perizinan | | Persentase Apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan PKRT yang memenuhi standar | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | |
| | | | | Meningkatnya pemenuhan komitmen persyaratan perizinan sarana apotek, toko obat, toko alkes, dan optikal | Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan | 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | |
| | | | | | | 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | |
| | | | | Meningkatnya pemenuhan komitmen persyaratan perizinan sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Persentase sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang memiliki izin dan memenuhi komitmen persyaratan izin | 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | |
| | | | | | | 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | |
| | | | Meningkatnya Penyediaan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang memenuhi persyaratan | | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | |
| | | | | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, | Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar | 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | |
| | | | | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi ketentuan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan | 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | |
| | | | | | | 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | |
| | | | | Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Persentase Sentra Makanan yang mendapatkan stiker pembinaan | 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | |
| | | | | | | 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | |
| | | | | Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Persentase Produk IRTP yang Memenuhi Ketentuan | 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | |
| | | | | | | 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | | Persentase Posyandu melayani siklus hidup | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | |
| | | | | Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, | | 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya | Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| | | | | Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat | 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | | Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | | 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | | 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |
| | | | | | | 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Tersedianya Dokumen administrasi keuangan PD yang disusun tepat waktu | Jumlah Dokumen administasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | Tersedianya Dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen administrasi pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | | 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | | 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | |
| | | | | | | 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |
| | | | | | | 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |
| | | | | | | 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum PD | Prosentase Pemenuhan administrasi umum | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | | 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |
| | | | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | | 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | | 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | |
| | | | | | | 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | | 1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Terlaksananya pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang PD | Jumlah pemenuhan Laporan Penyediaan jasa penunjang PD | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | | 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | | 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada PD | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | | 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | | 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | | 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian setiap program, kegiatan, dan subkegiatan, maka perlu ditetapkan target kinerja. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, beserta target kinerja dan pendanaan indikatif tahun yang menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dalam perencanaan kinerja dan anggaran.

**Tabel 4.2**
**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | **542.662.575.697,78** | | **548.691.800.000** | | **556.867.600.000** | | **568.228.000.000** | | **581.550.400.000** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan** | | | | | **209.662.589.093,78** | | **208.243.953.024,00** | | **213.831.357.467,28** | | **217.278.828.115,70** | | **217.701.193.843,76** | |
| 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 109.608.869.563,78 | | 108.944.845.024,00 | | 113.050.257.467,28 | | 114.437.643.115,70 | | 112.441.168.843,76 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 75,31 | 75,81 | 76,57 | 109.608.869.563,78 | 77,33 | 108.944.845.024,00 | 78,11 | 113.050.257.467,28 | 78,89 | 114.437.643.115,70 | 79,68 | 112.441.168.843,76 | |
| 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 73.070.000 | | 73.890.000 | | 74.995.000 | | 76.535.000 | | 78.335.000 | |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (Dokumen) | 18 | 22 | 19 | 73.070.000 | 19 | 73.890.000 | 19 | 74.995.000 | 19 | 76.535.000 | 19 | 78.335.000 | |
| 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 9.888.800 | | 10.000.000 | | 10.150.000 | | 10.360.000 | | 10.605.000 | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 3 | 3 | 9.888.800 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.150.000 | 2 | 10.360.000 | 3 | 10.605.000 | |
| 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | 34.984.000 | | 35.375.000 | | 35.905.000 | | 36.640.000 | | 37.500.000 | |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | 4 | 6 | 34.984.000 | 6 | 35.375.000 | 6 | 35.905.000 | 6 | 36.640.000 | 6 | 37.500.000 | |
| 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 28.197.200 | | 28.515.000 | | 28.940.000 | | 29.535.000 | | 30.230.000 | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | 6 | 12 | 28.197.200 | 12 | 28.515.000 | 12 | 28.940.000 | 12 | 29.535.000 | 12 | 30.230.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 101.948.760.051,78 | | 101.991.610.024,00 | | 104.457.542.467,28 | | 105.220.583.115,70 | | 103.078.578.843,76 | |
| Tersedianya Dokumen administrasi keuangan PD yang disusun tepat waktu | Jumlah Dokumen administasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 101.948.760.051,78 | 12 | 101.991.610.024,00 | 12 | 104.457.542.467,28 | 12 | 105.220.583.115,70 | 12 | 103.078.578.843,76 | |
| 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 101.888.760.051,78 | | 101.930.940.024 | | 104.395.967.467,28 | | 105.157.748.115,70 | | 103.014.268.843,76 | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 2204 | 1.600 | 2.000 | 101.888.760.051,78 | 2.000 | 101.930.940.024 | 2.000 | 104.395.967.467,28 | 2.000 | 105.157.748.115,70 | 2.000 | 103.014.268.843,76 | |
| 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | 60.000.000 | | 60.670.000 | | 61.575.000 | | 62.835.000 | | 64.310.000 | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.670.000 | 12 | 61.575.000 | 12 | 62.835.000 | 12 | 64.310.000 | |
| 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 0 | | 11.000.000 | | 11.165.000 | | 11.395.000 | | 11.665.000 | |
| Tersedianya Dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen administrasi pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (Dokumen) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11.000.000 | 8 | 11.165.000 | 8 | 11.395.000 | 8 | 11.665.000 | |
| 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | 0 | | 11.000.000 | | 11.165.000 | | 11.395.000 | | 11.665.000 | |
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.000.000 | 4 | 11.165.000 | 4 | 11.395.000 | 4 | 11.665.000 | |
| 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 342.600.000 | | 214.450.000 | | 217.655.000 | | 222.110.000 | | 227.320.000 | |
| Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen kepegawaian PD yang | 4 | 4 | 4 | 342.600.000 | 4 | 214.450.000 | 4 | 217.655.000 | 4 | 222.110.000 | 4 | 227.320.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | dilaporkan tepat waktu (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | 0 | | 52.950.000 | | 53.740.000 | | 54.840.000 | | 56.125.000 | |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 52.950.000 | 120 | 53.740.000 | 120 | 54.840.000 | 120 | 56.125.000 | |
| 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | 342.600.000 | | 9.700.000 | | 9.845.000 | | 10.050.000 | | 10.290.000 | |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 0 | 12 | 2 | 342.600.000 | 2 | 9.700.000 | 2 | 9.845.000 | 2 | 10.050.000 | 2 | 10.290.000 | |
| 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | 0 | | 8.800.000 | | 8.935.000 | | 9.120.000 | | 9.335.000 | |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.800.000 | 2 | 8.935.000 | 2 | 9.120.000 | 2 | 9.335.000 | |
| 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | 0 | | 143.000.000 | | 145.135.000 | | 148.100.000 | | 151.570.000 | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 143.000.000 | 120 | 145.135.000 | 120 | 148.100.000 | 120 | 151.570.000 | |
| 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 294.613.000 | | 359.250.000 | | 364.610.000 | | 372.050.000 | | 380.760.000 | |
| Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum PD | Prosentase Pemenuhan administrasi umum (%) | 100 | 100 | 100 | 294.613.000 | 100 | 359.250.000 | 100 | 364.610.000 | 100 | 372.050.000 | 100 | 380.760.000 | |
| 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 221.183.000 | | 303.800.000 | | 308.330.000 | | 314.620.000 | | 321.985.000 | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 9 | 9 | 9 | 221.183.000 | 9 | 303.800.000 | 9 | 308.330.000 | 9 | 314.620.000 | 9 | 321.985.000 | |
| 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | 73.430.000 | | 55.450.000 | | 56.280.000 | | 57.430.000 | | 58.775.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 0 | 1 | 1 | 73.430.000 | 1 | 55.450.000 | 1 | 56.280.000 | 1 | 57.430.000 | 1 | 58.775.000 | |
| 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 859.384.000 | | 1.310.000.000 | | 2.865.365.000 | | 3.372.825.000 | | 3.381.555.000 | |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD (%) | 100 | 100 | 100 | 859.384.000 | 100 | 1.310.000.000 | 100 | 2.865.365.000 | 100 | 3.372.825.000 | 100 | 3.381.555.000 | |
| 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | 0 | | 450.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | | | 0 | | 160.000.000 | | 162.385.000 | | 165.700.000 | | 169.580.000 | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160.000.000 | 2 | 162.385.000 | 2 | 165.700.000 | 2 | 169.580.000 | |
| 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 859.384.000 | | 200.000.000 | | 202.980.000 | | 207.125.000 | | 211.975.000 | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 8 | 17 | 17 | 859.384.000 | 17 | 200.000.000 | 17 | 202.980.000 | 17 | 207.125.000 | 17 | 211.975.000 | |
| 1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | 0 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 0 | | 0 | | 2.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | |
| Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000.000 | 1 | 3.000.000.000 | 1 | 3.000.000.000 | |
| 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4.413.103.512 | | 4.462.095.000 | | 4.528.585.000 | | 4.620.975.000 | | 4.729.110.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang PD | Jumlah pemenuhan Laporan Penyediaan jasa penunjang PD (Laporan) | 8 | 12 | 10 | 4.413.103.512 | 10 | 4.462.095.000 | 10 | 4.528.585.000 | 10 | 4.620.975.000 | 10 | 4.729.110.000 | |
| 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | 339.681.048 | | 343.455.000 | | 348.575.000 | | 355.690.000 | | 364.015.000 | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 12 | 339.681.048 | 12 | 343.455.000 | 12 | 348.575.000 | 12 | 355.690.000 | 12 | 364.015.000 | |
| 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 4.073.422.464 | | 4.118.640.000 | | 4.180.010.000 | | 4.265.285.000 | | 4.365.095.000 | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 12 | 4.073.422.464 | 12 | 4.118.640.000 | 12 | 4.180.010.000 | 12 | 4.265.285.000 | 12 | 4.365.095.000 | |
| 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.677.339.000 | | 522.550.000 | | 530.340.000 | | 541.170.000 | | 553.845.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada PD | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik (Unit) | 16 | 17 | 17 | 1.677.339.000 | 17 | 522.550.000 | 17 | 530.340.000 | 17 | 541.170.000 | 17 | 553.845.000 | |
| 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | 184.500.000 | | 186.550.000 | | 189.330.000 | | 193.195.000 | | 197.720.000 | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 19 | 17 | 18 | 184.500.000 | 18 | 186.550.000 | 18 | 189.330.000 | 18 | 193.195.000 | 18 | 197.720.000 | |
| 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 134.505.000 | | 136.000.000 | | 138.030.000 | | 140.850.000 | | 144.150.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 4 | 128 | 130 | 134.505.000 | 133 | 136.000.000 | 133 | 138.030.000 | 133 | 140.850.000 | 133 | 144.150.000 | |
| 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | 1.358.334.000 | | 200.000.000 | | 202.980.000 | | 207.125.000 | | 211.975.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 1 | 1.358.334.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 202.980.000 | 1 | 207.125.000 | 1 | 211.975.000 | |
| 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 98.218.334.430 | | 97.654.373.000 | | 99.107.435.000 | | 101.127.355.000 | | 103.499.065.000 | |
| Meningkatnya kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Lanjutan | Persentase fasyankes yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) (%) | 100 | 100 | 100 | 26.047.680.779 | 100 | 23.559.403.000 | 100 | 23.909.845.000 | 100 | 24.423.570.000 | 100 | 23.002.665.000 | |
| | Persentase fasilitas kesehatan primer yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar (%) | 60 | 64 | 70 | | 75 | | 82 | | 91 | | 95 | | |
| | Persentase Pemenuhan SPA RSUD (%) | 76,64 | 77 | 78 | | 79,5 | | 80,5 | | 82,5 | | 84 | | |
| | Persentase Puskesmas yang memenuhi rasio Puskesmas terhadap populasi (%) | 93,93 | 93,93 | 93,93 | | 96,96 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Proporsi Fasilitas Kesehatan yang terpenuhi Alat Kesehatan sesuai standar (%) | 16,7 | 5,6 | 11,1 | | 16,67 | | 22,2 | | 27,8 | | 33,3 | | |
| | Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%) | 40 | 50 | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | |
| 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 25.615.950.779 | | 23.122.873.000 | | 23.466.800.000 | | 23.971.475.000 | | 22.539.980.000 | |
| Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana RSUD | Persentase pemenuhan Sarana & prasarana RSUD (%) | 0 | 75 | 100 | 9.899.169.000 | 100 | 4.000.000.000 | 100 | 6.000.000.000 | 100 | 5.600.000.000 | 100 | 8.000.000.000 | |
| 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | 9.899.169.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah | 0 | 0 | 1 | 9.899.169.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Penduduk Minimal 1:1000 (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | 0 | | 0 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 2.000.000.000 | |
| Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | |
| 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit | | | | | 0 | | 4.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | 4.600.000.000 | | 6.000.000.000 | |
| Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.000.000.000 | 1 | 5.000.000.000 | 1 | 4.600.000.000 | 1 | 6.000.000.000 | |
| Meningkatnya pemenuhan sarana dan parasarana Puskesmas dan Faskes Lainnya | Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 6.472.490.518 | 100 | 6.860.295.000 | 100 | 6.955.065.000 | 100 | 7.096.955.000 | 100 | 3.031.460.000 | |
| | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (%) | 0 | 0 | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas | | | | | 0 | | 3.500.000.000 | | 3.552.150.000 | | 3.624.615.000 | | 0 | |
| Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.500.000.000 | 1 | 3.552.150.000 | 1 | 3.624.615.000 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas | | | | | 5.374.385.700 | | 1.750.000.000 | | 1.776.075.000 | | 1.812.310.000 | | 1.854.720.000 | |
| Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan | 1 | 3 | 10 | 5.374.385.700 | 3 | 1.750.000.000 | 3 | 1.776.075.000 | 3 | 1.812.310.000 | 3 | 1.854.720.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | 0 | | 500.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | 1.098.104.818 | | 1.110.295.000 | | 1.126.840.000 | | 1.149.830.000 | | 1.176.740.000 | |
| Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | 1 | 4 | 1.098.104.818 | 2 | 1.110.295.000 | 2 | 1.126.840.000 | 2 | 1.149.830.000 | 2 | 1.176.740.000 | |
| 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | 0 | | 0 | | 500.000.000 | | 510.200.000 | | 0 | |
| Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500.000.000 | 1 | 510.200.000 | 0 | 0 | |
| Meningkatnya pemenuhan alat kesehatan di Fasyankes | Persentase pemenuhan alat kesehatan di Fasyankes (%) | 16,7 | 5,6 | 11,1 | 985.752.931 | 16,7 | 3.912.363.000 | 22,2 | 2.037.100.000 | 27,8 | 2.626.995.000 | 33,3 | 2.658.635.000 | |
| 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | 792.666.000 | | 3.717.128.000 | | 1.838.955.000 | | 2.424.805.000 | | 2.451.710.000 | |
| Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 273 | 80 | 150 | 792.666.000 | 100 | 3.717.128.000 | 65 | 1.838.955.000 | 65 | 2.424.805.000 | 65 | 2.451.710.000 | |
| 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | 193.086.931 | | 195.235.000 | | 198.145.000 | | 202.190.000 | | 206.925.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 752 | 866 | 853 | 193.086.931 | 853 | 195.235.000 | 853 | 198.145.000 | 853 | 202.190.000 | 853 | 206.925.000 | |
| Meningkatnya pemenuhan obat dan vaksin di Puskesmas | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (%) | 60 | 64 | 70 | 8.258.538.330 | 70 | 8.350.215.000 | 70 | 8.474.635.000 | 70 | 8.647.525.000 | 70 | 8.849.885.000 | |
| 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | 8.135.431.730 | | 8.225.740.000 | | 8.348.305.000 | | 8.518.615.000 | | 8.717.955.000 | |
| Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) | 60 | 60 | 70 | 8.135.431.730 | 70 | 8.225.740.000 | 70 | 8.348.305.000 | 70 | 8.518.615.000 | 70 | 8.717.955.000 | |
| 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | 123.106.600 | | 124.475.000 | | 126.330.000 | | 128.910.000 | | 131.930.000 | |
| Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) | 264 | 330 | 330 | 123.106.600 | 330 | 124.475.000 | 330 | 126.330.000 | 330 | 128.910.000 | 330 | 131.930.000 | |
| 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | | 6.400.000 | | 6.475.000 | | 6.575.000 | | 6.710.000 | | 6.870.000 | |
| Meningkatnya fasyankes yang terdaftar ke SIKN | Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN (%) | 40 | 50 | 55 | 6.400.000 | 60 | 6.475.000 | 65 | 6.575.000 | 70 | 6.710.000 | 75 | 6.870.000 | |
| 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | 6.400.000 | | 6.475.000 | | 6.575.000 | | 6.710.000 | | 6.870.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 0 | 5 | 2 | 6.400.000 | 2 | 6.475.000 | 2 | 6.575.000 | 2 | 6.710.000 | 2 | 6.870.000 | |
| 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 425.330.000 | | 430.055.000 | | 436.470.000 | | 445.385.000 | | 455.815.000 | |
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Izin Operasionalnya Berlaku | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Izin Operasionalnya berlaku (%) | 100 | 100 | 100 | 425.330.000 | 100 | 430.055.000 | 100 | 436.470.000 | 100 | 445.385.000 | 100 | 455.815.000 | |
| 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | | | 7.900.000 | | 7.990.000 | | 8.110.000 | | 8.280.000 | | 8.475.000 | |
| Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit) | 6 | 6 | 3 | 7.900.000 | 6 | 7.990.000 | 13 | 8.110.000 | 10 | 8.280.000 | 7 | 8.475.000 | |
| 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | 8.000.000 | | 8.090.000 | | 8.215.000 | | 8.385.000 | | 8.585.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | 64 | 35 | 64 | 8.000.000 | 64 | 8.090.000 | 64 | 8.215.000 | 64 | 8.385.000 | 64 | 8.585.000 | |
| 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | 409.430.000 | | 413.975.000 | | 420.145.000 | | 428.720.000 | | 438.755.000 | |
| Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen) | 2 | 9 | 12 | 409.430.000 | 12 | 413.975.000 | 12 | 420.145.000 | 12 | 428.720.000 | 12 | 438.755.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 58.844.989.578 | 100 | 60.523.180.000 | 100 | 61.424.990.000 | 100 | 62.652.180.000 | 100 | 66.118.260.000 | |
| | Persentase cakupan JKN (%) | 99,42 | 99,45 | 99,48 | | 99,51 | | 99,54 | | 99,58 | | 99,6 | | |
| 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 58.844.989.578 | | 60.523.180.000 | | 61.424.990.000 | | 62.652.180.000 | | 66.118.260.000 | |
| Meningkatnya Jangkauan Pembiayaan Kesehatan | Cakupan kepesertaan aktif JKN (%) | 78,82 | 81 | 82 | 54.503.710.816 | 82,5 | 55.108.705.000 | 83 | 55.929.825.000 | 83,5 | 57.070.795.000 | 84 | 60.406.255.000 | |
| 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | 54.503.710.816 | | 55.108.705.000 | | 55.929.825.000 | | 57.070.795.000 | | 60.406.255.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 54.503.710.816 | 12 | 55.108.705.000 | 12 | 55.929.825.000 | 12 | 57.070.795.000 | 12 | 60.406.255.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Persentase kelompok asuhan mandiri yang mendukung program prioritas (%) | 60 | 60 | 60 | 4.341.278.762 | 70 | 5.414.475.000 | 70 | 5.495.165.000 | 80 | 5.581.385.000 | 80 | 5.712.005.000 | |
| | Persentase Fasyankes yang terpenuhi kebutuhan operasionalnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu (%) | 95 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase puskesmas yang memiliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | 8.000.000 | | 8.090.000 | | 8.215.000 | | 8.385.000 | | 8.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri | 33 | 3 | 33 | 8.000.000 | 33 | 8.090.000 | 33 | 8.215.000 | 33 | 8.385.000 | 33 | 8.585.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | dan Tradisional Lainnya (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | 146.241.000 | | 147.865.000 | | 150.070.000 | | 153.135.000 | | 156.720.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen) | 4 | 15 | 4 | 146.241.000 | 4 | 147.865.000 | 4 | 150.070.000 | 4 | 153.135.000 | 4 | 156.720.000 | |
| 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | 0 | | 1.000.000.000 | | 1.014.900.000 | | 1.035.605.000 | | 1.059.840.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000.000.000 | 4 | 1.014.900.000 | 4 | 1.035.605.000 | 4 | 1.059.840.000 | |
| 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | 3.731.938.500 | | 3.773.365.000 | | 3.829.590.000 | | 3.907.715.000 | | 3.999.160.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 6 | 94 | 4 | 3.731.938.500 | 4 | 3.773.365.000 | 4 | 3.829.590.000 | 4 | 3.907.715.000 | 4 | 3.999.160.000 | |
| 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 25.000.000 | | 25.375.000 | | 0 | | 0 | |
| Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 25.000.000 | 48 | 25.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | 455.099.262 | | 460.155.000 | | 467.015.000 | | 476.545.000 | | 487.700.000 | |
| Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan | 1 | 1 | 1 | 455.099.262 | 1 | 460.155.000 | 1 | 467.015.000 | 1 | 476.545.000 | 1 | 487.700.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 9.228.152.273 | 0,8 | 9.330.615.000 | 0,75 | 9.469.670.000 | 0,7 | 9.662.880.000 | 0,7 | 9.889.015.000 | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 8,5 | 8 | 7,5 | | 7 | | 6,5 | | 6 | | 5,5 | | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 9,75 | 9,5 | 9,3 | | 9 | | 8,5 | | 8 | | 7,5 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 240 | 230 | 220 | | 210 | | 200 | | 190 | | 180 | | |
| 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 9.228.152.273 | | 9.330.615.000 | | 9.469.670.000 | | 9.662.880.000 | | 9.889.015.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 70,65 | 75,31 | 79,22 | 5.696.401.073 | 81,83 | 5.759.660.000 | 84,34 | 5.845.505.000 | 86,34 | 5.964.780.000 | 88,7 | 6.104.375.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 88 | 88,47 | 89,19 | | 89,21 | | 89,59 | | 89,96 | | 90,3 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 2.841.118.833 | | 2.872.660.000 | | 2.915.465.000 | | 2.974.945.000 | | 3.044.560.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 14.553 | 15.320 | 15.692 | 2.841.118.833 | 15.583 | 2.872.660.000 | 15.475 | 2.915.465.000 | 15.368 | 2.974.945.000 | 15.261 | 3.044.560.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 32.614.400 | | 32.980.000 | | 33.475.000 | | 34.160.000 | | 34.960.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 15.518 | 16.545 | 15.692 | 32.614.400 | 15.583 | 32.980.000 | 15.475 | 33.475.000 | 15.368 | 34.160.000 | 15.261 | 34.960.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 502.909.400 | | 508.495.000 | | 516.075.000 | | 526.605.000 | | 538.930.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 15.285 | 16.143 | 15.285 | 502.909.400 | 15.180 | 508.495.000 | 15.075 | 516.075.000 | 14.970 | 526.605.000 | 14.866 | 538.930.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 73.100.500 | | 73.915.000 | | 75.020.000 | | 76.555.000 | | 78.350.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 66.411 | 63.889 | 67.942 | 73.100.500 | 67.535 | 73.915.000 | 67.130 | 75.020.000 | 66.727 | 76.555.000 | 66.325 | 78.350.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 80.314.400 | | 81.210.000 | | 82.425.000 | | 84.110.000 | | 86.080.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 152.759 | 143.443 | 163.034 | 80.314.400 | 163.573 | 81.210.000 | 164.112 | 82.425.000 | 164.653 | 84.110.000 | 165.196 | 86.080.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 31.639.840 | | 31.995.000 | | 32.475.000 | | 33.140.000 | | 33.920.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 4 | 9 | 4 | 31.639.840 | 4 | 31.995.000 | 4 | 32.475.000 | 4 | 33.140.000 | 4 | 33.920.000 | |
| 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | 1.118.818.600 | | 1.131.240.000 | | 1.148.100.000 | | 1.171.525.000 | | 1.198.940.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 1.118.818.600 | 4 | 1.131.240.000 | 4 | 1.148.100.000 | 4 | 1.171.525.000 | 4 | 1.198.940.000 | |
| 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | 1.015.885.100 | | 1.027.165.000 | | 1.042.470.000 | | 1.063.740.000 | | 1.088.635.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 0 | 4 | 4 | 1.015.885.100 | 4 | 1.027.165.000 | 4 | 1.042.470.000 | 4 | 1.063.740.000 | 4 | 1.088.635.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 78,87 | 80 | 85 | 3.531.751.200 | 85 | 3.570.955.000 | 90 | 3.624.165.000 | 90 | 3.698.100.000 | 95 | 3.784.640.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 3.531.751.200 | | 3.570.955.000 | | 3.624.165.000 | | 3.698.100.000 | | 3.784.640.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 3.531.751.200 | 12 | 3.570.955.000 | 12 | 3.624.165.000 | 12 | 3.698.100.000 | 12 | 3.784.640.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (Per 1000 Penduduk) | 1 | 1 | 1 | 3.115.494.400 | 1 | 3.148.995.000 | 1 | 3.194.450.000 | 1 | 3.257.605.000 | 1 | 3.331.515.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi. (Orang) | 0,26 | 0,24 | 0,22 | | 0,2 | | 0,18 | | 0,16 | | 0,14 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 86 | 89 | 90 | | 92 | | 93 | | 94 | | 95 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 35,45 | 40 | 45 | | 50 | | 60 | | 70 | | 80 | | |
| | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%)) | 79,1 | 82 | 85 | | 90 | | 95 | | 97 | | 98 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 41,66 | 43 | 46 | | 49 | | 52 | | 55 | | 60 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 3.115.494.400 | | 3.148.995.000 | | 3.194.450.000 | | 3.257.605.000 | | 3.331.515.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | 226 | 200 | 174 | 2.718.744.400 | 148 | 2.748.940.000 | 122 | 2.789.915.000 | 96 | 2.846.845.000 | 65 | 2.913.475.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | 49 | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 85 | 87 | 90 | | 92 | | 94 | | 96 | | 98 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 1.686.769.000 | | 1.705.495.000 | | 1.730.910.000 | | 1.766.225.000 | | 1.807.555.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 19.163 | 17.925 | 12.093 | 1.686.769.000 | 10.681 | 1.705.495.000 | 9.607 | 1.730.910.000 | 8.776 | 1.766.225.000 | 8.158 | 1.807.555.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 565.164.400 | | 571.440.000 | | 579.955.000 | | 591.790.000 | | 605.640.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 21.602 | 20.749 | 21.663 | 565.164.400 | 21.976 | 571.440.000 | 22.105 | 579.955.000 | 22.228 | 591.790.000 | 22.344 | 605.640.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 385.426.000 | | 389.705.000 | | 395.515.000 | | 403.585.000 | | 413.030.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 36 | 101 | 12 | 385.426.000 | 12 | 389.705.000 | 12 | 395.515.000 | 12 | 403.585.000 | 12 | 413.030.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 16.680.000 | | 16.870.000 | | 17.125.000 | | 17.475.000 | | 17.885.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 2.584 | 2.906 | 2.488 | 16.680.000 | 2.198 | 16.870.000 | 1.977 | 17.125.000 | 1.806 | 17.475.000 | 1.679 | 17.885.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 49.600.000 | | 50.155.000 | | 50.905.000 | | 51.945.000 | | 53.165.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan | 602 | 602 | 902 | 49.600.000 | 1.002 | 50.155.000 | 1.202 | 50.905.000 | 1.402 | 51.945.000 | 1.602 | 53.165.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 15.105.000 | | 15.275.000 | | 15.505.000 | | 15.825.000 | | 16.200.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 6 | 8 | 8 | 15.105.000 | 8 | 15.275.000 | 8 | 15.505.000 | 8 | 15.825.000 | 8 | 16.200.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 91,12 | 92 | 93 | 183.950.000 | 94 | 186.000.000 | 95 | 188.780.000 | 95 | 192.640.000 | 95 | 197.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 39.440.000 | | 39.880.000 | | 40.475.000 | | 41.305.000 | | 42.275.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 10 | 185 | 12 | 39.440.000 | 12 | 39.880.000 | 12 | 40.475.000 | 12 | 41.305.000 | 12 | 42.275.000 | |
| 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | 70.070.000 | | 70.850.000 | | 71.910.000 | | 73.380.000 | | 75.100.000 | |
| Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket) | 12 | 12 | 12 | 70.070.000 | 12 | 70.850.000 | 12 | 71.910.000 | 12 | 73.380.000 | 12 | 75.100.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 74.440.000 | | 75.270.000 | | 76.395.000 | | 77.955.000 | | 79.780.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 74.440.000 | 12 | 75.270.000 | 12 | 76.395.000 | 12 | 77.955.000 | 12 | 79.780.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 301.383 | 314.409 | 314.778 | 212.800.000 | 315.148 | 214.055.000 | 315.518 | 215.755.000 | 315.888 | 218.120.000 | 316.258 | 220.885.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 112.800.000 | | 114.055.000 | | 115.755.000 | | 118.120.000 | | 120.885.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 112.800.000 | 12 | 114.055.000 | 12 | 115.755.000 | 12 | 118.120.000 | 12 | 120.885.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | N/A | 15 | 20 | 982.017.400 | 25 | 1.092.180.000 | 30 | 1.108.480.000 | 35 | 1.131.120.000 | 40 | 1.157.610.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 70 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | 45 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 982.017.400 | | 1.092.180.000 | | 1.108.480.000 | | 1.131.120.000 | | 1.157.610.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 45 | 50 | 55 | 982.017.400 | 60 | 1.092.180.000 | 65 | 1.108.480.000 | 70 | 1.131.120.000 | 75 | 1.157.610.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 45 | 50 | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase puskesmas dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis > 80% (%) | N/A | 20 | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | 45 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 561.898.000 | | 568.140.000 | | 576.610.000 | | 588.375.000 | | 602.145.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 601.392 | 762.200 | 759.218 | 561.898.000 | 758.610 | 568.140.000 | 758.003 | 576.610.000 | 757.396 | 588.375.000 | 756.790 | 602.145.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 74.264.400 | | 75.090.000 | | 76.210.000 | | 77.765.000 | | 79.585.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 162.972 | 165.819 | 181.536 | 74.264.400 | 184.258 | 75.090.000 | 187.020 | 76.210.000 | 189.825 | 77.765.000 | 192.674 | 79.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 126.880.000 | | 128.290.000 | | 130.205.000 | | 132.865.000 | | 135.975.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 82.916 | 88.230 | 88.250 | 126.880.000 | 88.270 | 128.290.000 | 88.290 | 130.205.000 | 88.310 | 132.865.000 | 88.330 | 135.975.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 170.000.000 | | 171.890.000 | | 174.455.000 | | 178.015.000 | | 182.185.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 21.848 | 20.380 | 20.400 | 170.000.000 | 20.420 | 171.890.000 | 20.440 | 174.455.000 | 20.460 | 178.015.000 | 20.480 | 182.185.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 48.975.000 | | 49.520.000 | | 50.260.000 | | 51.290.000 | | 52.495.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 2.472 | 2.342 | 2.532 | 48.975.000 | 2.592 | 49.520.000 | 2.652 | 50.260.000 | 2.714 | 51.290.000 | 2.777 | 52.495.000 | |
| 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | 0 | | 25.000.000 | | 25.375.000 | | 25.895.000 | | 26.505.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 25.000.000 | 21 | 25.375.000 | 24 | 25.895.000 | 27 | 26.505.000 | |
| 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | 0 | | 22.000.000 | | 22.330.000 | | 22.790.000 | | 23.325.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 22.000.000 | 20 | 22.330.000 | 25 | 22.790.000 | 30 | 23.325.000 | |
| 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | 0 | | 22.000.000 | | 22.330.000 | | 22.790.000 | | 23.325.000 | |
| Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 0 | 0 | 433.986 | 0 | 434.086 | 22.000.000 | 434.186 | 22.330.000 | 434.286 | 22.790.000 | 434.386 | 23.325.000 | |
| 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | 0 | | 30.250.000 | | 30.705.000 | | 31.335.000 | | 32.070.000 | |
| Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan) | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 30.250.000 | 8 | 30.705.000 | 10 | 31.335.000 | 12 | 32.070.000 | |
| 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 962.271.070 | | 976.375.000 | | 995.450.000 | | 1.021.925.000 | | 1.053.020.000 | |
| Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan | Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi (Per 1000 Penduduk) | 1,87 | 1,94 | 2,02 | 962.271.070 | 2,11 | 976.375.000 | 2,19 | 995.450.000 | 2,28 | 1.021.925.000 | 2,36 | 1.053.020.000 | |
| 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | 6.000.000 | | 6.150.000 | | 6.290.000 | | 6.455.000 | | 6.760.000 | |
| Meningkatnya Tenaga Kesehatan yang memiliki Izin Praktik | Persentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktik (%) | 100 | 100 | 100 | 6.000.000 | 100 | 6.150.000 | 100 | 6.290.000 | 100 | 6.455.000 | 100 | 6.760.000 | |
| 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut | | | | | 6.000.000 | | 6.150.000 | | 6.290.000 | | 6.455.000 | | 6.760.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.150.000 | 12 | 6.290.000 | 12 | 6.455.000 | 12 | 6.760.000 | |
| 1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | 171.864.670 | | 173.780.000 | | 176.375.000 | | 179.980.000 | | 184.195.000 | |
| Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar | Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar (%) | 17,1 | 20 | 25,7 | 171.864.670 | 31,4 | 173.780.000 | 37,1 | 176.375.000 | 42,8 | 179.980.000 | 48,5 | 184.195.000 | |
| 1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | 33.000.000 | | 33.370.000 | | 33.870.000 | | 34.565.000 | | 35.375.000 | |
| Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 33.000.000 | 1 | 33.370.000 | 1 | 33.870.000 | 1 | 34.565.000 | 1 | 35.375.000 | |
| 1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | 138.864.670 | | 140.410.000 | | 142.505.000 | | 145.415.000 | | 148.820.000 | |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 7 | 12 | 12 | 138.864.670 | 12 | 140.410.000 | 12 | 142.505.000 | 12 | 145.415.000 | 12 | 148.820.000 | |
| 1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 784.406.400 | | 796.445.000 | | 812.785.000 | | 835.490.000 | | 862.065.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan | Persentase named nakes yang ditingkatkan mutunya (%) | 100 | 100 | 100 | 784.406.400 | 100 | 796.445.000 | 100 | 812.785.000 | 100 | 835.490.000 | 100 | 862.065.000 | |
| 1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 784.406.400 | | 796.445.000 | | 812.785.000 | | 835.490.000 | | 862.065.000 | |
| Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | 601 | 375 | 300 | 784.406.400 | 300 | 796.445.000 | 300 | 812.785.000 | 300 | 835.490.000 | 300 | 862.065.000 | |
| 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | 523.790.000 | | 529.700.000 | | 537.600.000 | | 548.600.000 | | 561.500.000 | |
| Meningkatnya kepatuhan sarana apotek, toko obat, toko alkes, optikal, dan PKRT dalam pemenuhan standar dan komitmen perizinan | Persentase Apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan PKRT yang memenuhi standar (%) | 55 | 60 | 60 | 45.880.000 | 60 | 50.450.000 | 60 | 51.200.000 | 60 | 52.265.000 | 60 | 53.540.000 | |
| 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | 45.880.000 | | 46.000.000 | | 46.690.000 | | 47.645.000 | | 48.760.000 | |
| Meningkatnya pemenuhan komitmen persyaratan perizinan sarana apotek, toko obat, toko alkes, dan optikal | Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%) | 100 | 100 | 100 | 45.880.000 | 100 | 46.000.000 | 100 | 46.690.000 | 100 | 47.645.000 | 100 | 48.760.000 | |
| 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | 45.880.000 | | 46.000.000 | | 46.690.000 | | 47.645.000 | | 48.760.000 | |
| Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan | 54 | 60 | 62 | 45.880.000 | 64 | 46.000.000 | 66 | 46.690.000 | 68 | 47.645.000 | 70 | 48.760.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | 0 | | 4.450.000 | | 4.510.000 | | 4.620.000 | | 4.780.000 | |
| Meningkatnya pemenuhan komitmen persyaratan perizinan sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Persentase sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang memiliki izin dan memenuhi komitmen persyaratan izin (%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.450.000 | 100 | 4.510.000 | 100 | 4.620.000 | 100 | 4.780.000 | |
| 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | 0 | | 4.450.000 | | 4.510.000 | | 4.620.000 | | 4.780.000 | |
| Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.450.000 | 1 | 4.510.000 | 1 | 4.620.000 | 1 | 4.780.000 | |
| Meningkatnya Penyediaan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang memenuhi persyaratan | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%) | 70 | 75 | 76 | 477.910.000 | 77 | 479.250.000 | 78 | 486.400.000 | 79 | 496.335.000 | 80 | 507.960.000 | |
| 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan | | | | | 109.940.000 | | 110.000.000 | | 111.640.000 | | 113.920.000 | | 116.590.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%) | 85 | 87 | 90 | 109.940.000 | 93 | 110.000.000 | 95 | 111.640.000 | 97 | 113.920.000 | 100 | 116.590.000 | |
| 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | 109.940.000 | | 110.000.000 | | 111.640.000 | | 113.920.000 | | 116.590.000 | |
| Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen) | 3 | 3 | 3 | 109.940.000 | 3 | 110.000.000 | 3 | 111.640.000 | 3 | 113.920.000 | 3 | 116.590.000 | |
| 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | 34.720.000 | | 35.000.000 | | 35.525.000 | | 36.250.000 | | 37.100.000 | |
| Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, | Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi ketentuan | 50 | 55 | 60 | 34.720.000 | 65 | 35.000.000 | 70 | 35.525.000 | 75 | 36.250.000 | 80 | 37.100.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | 34.720.000 | | 35.000.000 | | 35.525.000 | | 36.250.000 | | 37.100.000 | |
| Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen) | 24 | 24 | 24 | 34.720.000 | 24 | 35.000.000 | 24 | 35.525.000 | 24 | 36.250.000 | 24 | 37.100.000 | |
| 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | 14.150.000 | | 14.250.000 | | 14.465.000 | | 14.765.000 | | 15.115.000 | |
| Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Persentase Sentra Makanan yang mendapatkan stiker pembinaan (%) | N/A | 65 | 70 | 14.150.000 | 75 | 14.250.000 | 80 | 14.465.000 | 85 | 14.765.000 | 90 | 15.115.000 | |
| 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | 14.150.000 | | 14.250.000 | | 14.465.000 | | 14.765.000 | | 15.115.000 | |
| Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen) | N/A | 8 | 4 | 14.150.000 | 4 | 14.250.000 | 4 | 14.465.000 | 4 | 14.765.000 | 4 | 15.115.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | | | 319.100.000 | | 320.000.000 | | 324.770.000 | | 331.400.000 | | 339.155.000 | |
| Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Persentase Produk IRTP yang Memenuhi Ketentuan (%) | 85 | 87 | 90 | 319.100.000 | 92 | 320.000.000 | 95 | 324.770.000 | 97 | 331.400.000 | 100 | 339.155.000 | |
| 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | 319.100.000 | | 320.000.000 | | 324.770.000 | | 331.400.000 | | 339.155.000 | |
| Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) | 28 | 100 | 28 | 319.100.000 | 28 | 320.000.000 | 28 | 324.770.000 | 28 | 331.400.000 | 28 | 339.155.000 | |
| 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 349.324.030 | | 138.660.000 | | 140.615.000 | | 143.305.000 | | 146.440.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 38,08 | 75 | 80 | 349.324.030 | 85 | 138.660.000 | 90 | 140.615.000 | 95 | 143.305.000 | 100 | 146.440.000 | |
| 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 291.506.030 | | 80.660.000 | | 81.500.000 | | 82.500.000 | | 83.500.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0,28 | 10 | 15 | 291.506.030 | 20 | 80.660.000 | 25 | 81.500.000 | 30 | 82.500.000 | 35 | 83.500.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 291.506.030 | | 80.660.000 | | 81.500.000 | | 82.500.000 | | 83.500.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 12 | 4 | 4 | 291.506.030 | 4 | 80.660.000 | 4 | 81.500.000 | 4 | 82.500.000 | 4 | 83.500.000 | |
| 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 52.018.000 | | 52.000.000 | | 52.500.000 | | 53.000.000 | | 53.500.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 52,71 | 55 | 57,5 | 52.018.000 | 60 | 52.000.000 | 62,5 | 52.500.000 | 65 | 53.000.000 | 67,5 | 53.500.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 52.018.000 | | 52.000.000 | | 52.500.000 | | 53.000.000 | | 53.500.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 12 | 2 | 2 | 52.018.000 | 2 | 52.000.000 | 2 | 52.500.000 | 2 | 53.000.000 | 2 | 53.500.000 | |
| 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 5.800.000 | | 6.000.000 | | 6.615.000 | | 7.805.000 | | 9.440.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 9 | 12 | 15 | 5.800.000 | 18 | 6.000.000 | 21 | 6.615.000 | 24 | 7.805.000 | 27 | 9.440.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 5.800.000 | | 6.000.000 | | 6.615.000 | | 7.805.000 | | 9.440.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan | 4 | 4 | 4 | 5.800.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.615.000 | 4 | 7.805.000 | 4 | 9.440.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Waluyojati Kraksaan** | | | | | **168.333.672.440** | | **171.698.855.000** | | **174.252.710.000** | | **177.801.360.000** | | **181.954.905.000** | |
| 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 151.020.284.000 | | 152.696.615.000 | | 154.971.800.000 | | 158.133.230.000 | | 161.833.550.000 | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja Perangkat Daerah | Nilai LHE AKIP PD | 75,31 | 75,81 | 76,57 | 28.799.284.000 | 77,33 | 29.118.960.000 | 78,11 | 29.552.835.000 | 78,89 | 30.155.715.000 | 79,68 | 30.861.360.000 | |
| 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 28.799.284.000 | | 29.118.960.000 | | 29.552.835.000 | | 30.155.715.000 | | 30.861.360.000 | |
| Tersedianya Dokumen administrasi keuangan PD yang disusun tepat waktu | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu (dokumen) | 14 | 14 | 14 | 28.799.284.000 | 14 | 29.118.960.000 | 14 | 29.552.835.000 | 14 | 30.155.715.000 | 14 | 30.861.360.000 | |
| 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 28.799.284.000 | | 29.118.960.000 | | 29.552.835.000 | | 30.155.715.000 | | 30.861.360.000 | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 0 | 442 | 445 | 28.799.284.000 | 450 | 29.118.960.000 | 455 | 29.552.835.000 | 460 | 30.155.715.000 | 465 | 30.861.360.000 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Persentase capaian SPM Rumah Sakit (%) | 85 | 90 | 91 | 122.221.000.000 | 92 | 123.577.655.000 | 93 | 125.418.965.000 | 94 | 127.977.515.000 | 94 | 130.972.190.000 | |
| 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 122.221.000.000 | | 123.577.655.000 | | 125.418.965.000 | | 127.977.515.000 | | 130.972.190.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD RSUD sesuai standar | Jumlah lindikator capaian SPM yang memenuhi standart (indikator) | 1 | 80 | 82 | 122.221.000.000 | 84 | 123.577.655.000 | 86 | 125.418.965.000 | 88 | 127.977.515.000 | 90 | 130.972.190.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 122.221.000.000 | | 123.577.655.000 | | 125.418.965.000 | | 127.977.515.000 | | 130.972.190.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 122.221.000.000 | 1 | 123.577.655.000 | 1 | 125.418.965.000 | 1 | 127.977.515.000 | 1 | 130.972.190.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 17.013.388.440 | | 18.702.240.000 | | 18.980.910.000 | | 19.368.130.000 | | 19.821.355.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Lanjutan | Persentase Pemenuhan S/P/A di Fasyankes (%) | 71 | 71 | 72 | 17.013.388.440 | 73 | 18.702.240.000 | 74 | 18.980.910.000 | 75 | 19.368.130.000 | 76 | 19.821.355.000 | |
| | Persentase fasyankes yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) (%) | N/A | N/A | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 17.013.388.440 | | 18.202.240.000 | | 18.473.460.000 | | 18.850.325.000 | | 19.291.430.000 | |
| Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RSUD (%) | N/A | 83 | 83 | 17.013.388.440 | 84 | 18.202.240.000 | 84 | 18.473.460.000 | 84 | 18.850.325.000 | 85 | 19.291.430.000 | |
| | Persentase pemenuhan alat kesehatan RSUD (%) | N/A | 78 | 80 | | 82 | | 84 | | 86 | | 88 | | |
| 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | 9.013.388.440 | | 9.113.440.000 | | 9.249.235.000 | | 9.437.920.000 | | 9.658.770.000 | |
| Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | | 74 | 75 | 9.013.388.440 | 76 | 9.113.440.000 | 77 | 9.249.235.000 | 78 | 9.437.920.000 | 80 | 9.658.770.000 | |
| 1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | 500.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.014.900.000 | | 1.035.605.000 | | 1.059.840.000 | |
| Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 0 | 15 | 20 | 500.000.000 | 25 | 1.000.000.000 | 30 | 1.014.900.000 | 35 | 1.035.605.000 | 40 | 1.059.840.000 | |
| 1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit | | | | | 7.500.000.000 | | 8.088.800.000 | | 8.209.325.000 | | 8.376.800.000 | | 8.572.820.000 | |
| Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit | 1 | 1 | 1 | 7.500.000.000 | 1 | 8.088.800.000 | 1 | 8.209.325.000 | 1 | 8.376.800.000 | 1 | 8.572.820.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 500.000.000 | | 507.450.000 | | 517.805.000 | | 529.925.000 | |
| Terpenuhinya izin operasional RSUD | Persentase pemenuhan izin operasional RSUD (%) | N/A | N/A | 100 | 0 | 100 | 500.000.000 | 100 | 507.450.000 | 100 | 517.805.000 | 100 | 529.925.000 | |
| 1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | 0 | | 500.000.000 | | 507.450.000 | | 517.805.000 | | 529.925.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 500.000.000 | 1 | 507.450.000 | 1 | 517.805.000 | 1 | 529.925.000 | |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan | Persentase SDMK RSUD sesuai standart (%) | N/A | N/A | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | |
| 1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK di RSUD | Jumlah pelaksanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan (kali) | | | 3 | 300.000.000 | 3 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | |
| 1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | | 2 | 3 | 300.000.000 | 3 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0002 RSUD Tongas** | | | | | **41.702.658.185** | | **44.205.991.976** | | **42.382.502.533** | | **44.165.966.884** | | **49.892.526.156** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 33.806.905.206 | | 36.066.784.976 | | 34.122.007.533 | | 35.736.936.884 | | 41.266.236.156 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 75,31 | 75,81 | 76,57 | 14.084.880.206,00 | 77,33 | 16.123.441.161,90 | 78,11 | 13.881.562.280,09 | 78,89 | 15.083.617.514,20 | 79,68 | 20.118.098.264,20 | |
| 1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 12.679.780.654 | | 12.820.530.000 | | 13.011.560.000 | | 13.277.000.000 | | 13.587.685.000 | |
| Tersedianya Dokumen administrasi keuangan PD yang disusun tepat waktu | Jumlah Dokumen administasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu (dokumen) | 14 | 14 | 14 | 12.679.780.654 | 14 | 12.820.530.000 | 14 | 13.011.560.000 | 14 | 13.277.000.000 | 14 | 13.587.685.000 | |
| 1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 12.679.780.654 | | 12.820.530.000 | | 13.011.560.000 | | 13.277.000.000 | | 13.587.685.000 | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 191 | 191 | 191 | 12.679.780.654 | 191 | 12.820.530.000 | 191 | 13.011.560.000 | 191 | 13.277.000.000 | 191 | 13.587.685.000 | |
| 1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD (%) | 100 | 100 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | |
| 1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 3 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 25.000.000 | 3 | 25.000.000 | 3 | 25.000.000 | |
| 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 927.099.552 | | 2.776.611.161,90 | | 298.772.280,09 | | 1.191.464.514,20 | | 5.915.260.264,20 | |
| Terlaksananya pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang PD | Jumlah pemenuhan Laporan Penyediaan jasa penunjang PD (Laporan) | 12 | 12 | 12 | 927.099.552 | 12 | 2.776.611.161,90 | 12 | 298.772.280,09 | 12 | 1.191.464.514,20 | 12 | 5.915.260.264,20 | |
| 1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 927.099.552 | | 2.776.611.161,90 | | 298.772.280,09 | | 1.191.464.514,20 | | 5.915.260.264,20 | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 12 | 927.099.552 | 12 | 2.776.611.161,90 | 12 | 298.772.280,09 | 12 | 1.191.464.514,20 | 12 | 5.915.260.264,20 | |
| 1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 458.000.000 | | 506.300.000 | | 546.230.000 | | 590.153.000 | | 590.153.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada PD | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik (Unit) | 4 | 4 | 4 | 458.000.000 | 4 | 506.300.000 | 4 | 546.230.000 | 4 | 590.153.000 | 4 | 590.153.000 | |
| 1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | 95.000.000 | | 107.000.000 | | 107.000.000 | | 107.000.000 | | 107.000.000 | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | 0 | 8 | 95.000.000 | 8 | 107.000.000 | 9 | 107.000.000 | 9 | 107.000.000 | 9 | 107.000.000 | |
| 1.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 363.000.000 | | 399.300.000 | | 439.230.000 | | 483.153.000 | | 483.153.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | 0 | 4 | 4 | 363.000.000 | 4 | 399.300.000 | 4 | 439.230.000 | 4 | 483.153.000 | 4 | 483.153.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Persentase capaian SPM Rumah Sakit (%) | 85 | 90 | 91 | 19.722.025.000 | 92 | 19.943.343.814 | 93 | 20.240.445.253 | 94 | 20.653.319.370 | 94 | 21.148.137.892 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 19.722.025.000 | | 19.943.343.814,10 | | 20.240.445.252,63 | | 20.653.319.370,10 | | 21.148.137.892,04 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD RSUD sesuai standar | Jumlah lindikator capaian SPM yang memenuhi standart (indikator) | 78 | 78 | 78 | 19.722.025.000 | 78 | 19.943.343.814,10 | 80 | 20.240.445.252,63 | 80 | 20.653.319.370,10 | 80 | 21.148.137.892,04 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 19.722.025.000 | | 19.943.343.814,10 | | 20.240.445.252,63 | | 20.653.319.370,10 | | 21.148.137.892,04 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 19.722.025.000 | 1 | 19.943.343.814,10 | 1 | 20.240.445.252,63 | 1 | 20.653.319.370,10 | 1 | 21.148.137.892,04 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 7.622.464.819 | | 7.862.882.000 | | 7.980.045.000 | | 8.142.855.000 | | 8.333.410.000 | |
| Meningkatnya kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Lanjutan | Prosentase Pemenuhan S/P/A di Fasyankes | 70,75 | 71 | 73 | 7.622.464.819 | 75 | 7.712.882.000 | 77 | 7.827.810.000 | 80 | 7.987.510.000 | 82 | 8.174.425.000 | |
| | Persentase fasyankes yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 7.622.464.819 | | 7.612.882.000 | | 7.726.320.000 | | 7.883.945.000 | | 8.068.435.000 | |
| Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana RSUD | Persentase pemenuhan Sarana & prasarana RSUD (%) | 77 | 70 | 72 | 6.008.021.300 | 74 | 5.980.517.000 | 76 | 6.069.630.000 | 78 | 6.193.455.000 | 78 | 6.338.385.000 | |
| 1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | 303.425.000 | | 212.597.000 | | 215.765.000 | | 220.170.000 | | 225.325.000 | |
| Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program | 0 | 1 | 2 | 303.425.000 | 2 | 212.597.000 | 2 | 215.765.000 | 2 | 220.170.000 | 2 | 225.325.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit | | | | | 5.704.596.300 | | 5.767.920.000 | | 5.853.865.000 | | 5.973.285.000 | | 6.113.060.000 | |
| Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | 0 | 1 | 1 | 5.704.596.300 | 1 | 5.767.920.000 | 1 | 5.853.865.000 | 1 | 5.973.285.000 | 1 | 6.113.060.000 | |
| Meningkatnya pemenuhan alat kesehatan di Fasyankes | Persentase pemenuhan alat kesehatan di Fasyankes (%) | 34,88 | 50 | 57 | 1.614.443.519 | 60 | 1.632.365.000 | 63 | 1.656.690.000 | 66 | 1.690.490.000 | 66 | 1.730.050.000 | |
| 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | 943.096.400 | | 953.565.000 | | 967.775.000 | | 987.520.000 | | 1.010.630.000 | |
| Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 21 | 39 | 41 | 943.096.400 | 43 | 953.565.000 | 45 | 967.775.000 | 47 | 987.520.000 | 47 | 1.010.630.000 | |
| 1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | 671.347.119 | | 678.800.000 | | 688.915.000 | | 702.970.000 | | 719.420.000 | |
| Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 3 | 30 | 33 | 671.347.119 | 36 | 678.800.000 | 39 | 688.915.000 | 43 | 702.970.000 | 43 | 719.420.000 | |
| 1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 100.000.000 | | 101.490.000 | | 103.565.000 | | 105.990.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Izin Operasionalnya Berlaku | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Izin Operasionalnya berlaku (%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 101.490.000 | 100 | 103.565.000 | 100 | 105.990.000 | |
| 1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | 0 | | 100.000.000 | | 101.490.000 | | 103.565.000 | | 105.990.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 101.490.000 | 1 | 103.565.000 | 1 | 105.990.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | | | 0,8 | 0 | 0,8 | 150.000.000 | 0,75 | 152.235.000 | 0,7 | 155.345.000 | 0,7 | 158.985.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 150.000.000 | | 152.235.000 | | 155.345.000 | | 158.985.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | | | 79,22 | 0 | 81,83 | 150.000.000 | 84,34 | 152.235.000 | 86,34 | 155.345.000 | 88,7 | 158.985.000 | |
| 1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | 0 | | 150.000.000 | | 152.235.000 | | 155.345.000 | | 158.985.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 150.000.000 | 10 | 152.235.000 | 10 | 155.345.000 | 10 | 158.985.000 | |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 273.288.160 | | 276.325.000 | | 280.450.000 | | 286.175.000 | | 292.880.000 | |
| Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan | Persentase SDMK Rumah Sakit sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 273.288.160 | 100 | 276.325.000 | 100 | 280.450.000 | 100 | 286.175.000 | 100 | 292.880.000 | |
| 1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | 147.793.680 | | 149.429.681 | | 151.658.647 | | 154.752.083 | | 158.367.856 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Fasilitas kesehatan yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar | Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK (%) | 100 | 100 | 100 | 147.793.680 | 100 | 149.429.681 | 100 | 151.658.647 | 100 | 154.752.083 | 100 | 158.367.856 | |
| 1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | 147.793.680 | | 149.429.681 | | 151.658.647 | | 154.752.083 | | 158.367.856 | |
| Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) | 24 | 5 | 7 | 147.793.680 | 7 | 149.429.681 | 10 | 151.658.647 | 10 | 154.752.083 | 10 | 158.367.856 | |
| 1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 125.494.480 | | 126.895.319 | | 128.791.353 | | 131.422.917 | | 134.512.144 | |
| Meningkatnya mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan | Persentase named nakes yang ditingkatkan mutunya (%) | | | 100 | 125.494.480 | 100 | 126.895.319 | 100 | 128.791.353 | 100 | 131.422.917 | 100 | 134.512.144 | |
| 1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 125.494.480 | | 126.895.319 | | 128.791.353 | | 131.422.917 | | 134.512.144 | |
| Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | 170 | 40 | 64 | 125.494.480 | 66 | 126.895.319 | 68 | 128.791.353 | 70 | 131.422.917 | 70 | 134.512.144 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0003 - Puskesmas Kuripan** | | | | | **2.983.868.365** | | **3.021.130.000** | | **3.066.205.000** | | **3.128.825.000** | | **3.202.105.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.511.030.365 | | 2.538.905.000 | | 2.576.735.000 | | 2.629.305.000 | | 2.690.835.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 87,63 | 88 | 88,5 | 2.511.030.365 | 89 | 2.538.905.000 | 89,5 | 2.576.735.000 | 90 | 2.629.305.000 | 90,5 | 2.690.835.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.511.030.365 | | 2.538.905.000 | | 2.576.735.000 | | 2.629.305.000 | | 2.690.835.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 4 | 4 | 4 | 2.511.030.365 | 4 | 2.538.905.000 | 4 | 2.576.735.000 | 1 | 2.629.305.000 | 5 | 2.690.835.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.511.030.365 | | 2.538.905.000 | | 2.576.735.000 | | 2.629.305.000 | | 2.690.835.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.511.030.365 | 1 | 2.538.905.000 | 1 | 2.576.735.000 | 1 | 2.629.305.000 | 1 | 2.690.835.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 449.738.000 | | 452.365.000 | | 459.160.000 | | 468.585.000 | | 479.600.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 79.392.000 | 100 | 80.275.000 | 100 | 81.475.000 | 100 | 83.140.000 | 100 | 85.090.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 79.392.000 | | 80.275.000 | | 81.475.000 | | 83.140.000 | | 85.090.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 90,45 | 90,5 | 92,2 | 79.392.000 | 93,9 | 80.275.000 | 95,6 | 81.475.000 | 97,3 | 83.140.000 | 99 | 85.090.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 79.392.000 | | 80.275.000 | | 81.475.000 | | 83.140.000 | | 85.090.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 79.392.000 | 4 | 80.275.000 | 4 | 81.475.000 | 4 | 83.140.000 | 4 | 85.090.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 4 | 4 | 4 | 269.786.000 | 3 | 270.780.000 | 3 | 274.835.000 | 3 | 280.460.000 | 3 | 287.040.000 | |
| | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 2,82 | 2,54 | 2,28 | | 2,06 | | 1,85 | | 1,67 | | 1,5 | | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 2,4 | 2,18 | 1,96 | | 1,74 | | 1,53 | | 1,31 | | 10,9 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 269.786.000 | | 270.780.000 | | 274.835.000 | | 280.460.000 | | 287.040.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 82,83 | 84,33 | 85,83 | 145.186.000 | 87,33 | 146.800.000 | 87,38 | 148.990.000 | 87,43 | 152.030.000 | 87,48 | 155.590.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 145.186.000 | | 146.800.000 | | 148.990.000 | | 152.030.000 | | 155.590.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 145.186.000 | 12 | 146.800.000 | 12 | 148.990.000 | 12 | 152.030.000 | 12 | 155.590.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 71,15 | 74,15 | 77,15 | 124.600.000 | 80,15 | 123.980.000 | 83,15 | 125.845.000 | 86,15 | 128.430.000 | 89,15 | 131.450.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 91,71 | 92,01 | 92,5 | | 92,5 | | 92,5 | | 92,5 | | 92,5 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 69.200.000 | | 67.950.000 | | 68.965.000 | | 70.375.000 | | 72.025.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 405 | 424 | 412 | 69.200.000 | 409 | 67.950.000 | 406 | 68.965.000 | 403 | 70.375.000 | 400 | 72.025.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 412 | 424 | 412 | 2.000.000 | 409 | 2.025.000 | 406 | 2.060.000 | 403 | 2.105.000 | 400 | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 4.000.000 | | 4.045.000 | | 4.110.000 | | 4.195.000 | | 4.295.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 398 | 405 | 398 | 4.000.000 | 395 | 4.045.000 | 392 | 4.110.000 | 389 | 4.195.000 | 386 | 4.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 4.200.000 | | 4.250.000 | | 4.315.000 | | 4.405.000 | | 4.510.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.680 | 1.200 | 1.681 | 4.200.000 | 1.671 | 4.250.000 | 1.661 | 4.315.000 | 1.651 | 4.405.000 | 1.641 | 4.510.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 29.400.000 | | 29.730.000 | | 30.175.000 | | 30.795.000 | | 31.520.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.373 | 3.358 | 3.848 | 29.400.000 | 3.861 | 29.730.000 | 3.874 | 30.175.000 | 3.887 | 30.795.000 | 3.900 | 31.520.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 4.600.000 | | 4.655.000 | | 4.725.000 | | 4.825.000 | | 4.940.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 4.600.000 | 4 | 4.655.000 | 4 | 4.725.000 | 4 | 4.825.000 | 4 | 4.940.000 | |
| 1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | 11.200.000 | | 11.325.000 | | 11.495.000 | | 11.730.000 | | 12.005.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 0 | 12 | 4 | 11.200.000 | 4 | 11.325.000 | 4 | 11.495.000 | 4 | 11.730.000 | 4 | 12.005.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 111 | 95 | 96 | 79.560.000 | 97 | 80.060.000 | 98 | 81.270.000 | 99 | 82.950.000 | 100 | 84.910.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,131 | 0,1 | 0,05 | | 0,049 | | 0,029 | | 0,019 | | 0,009 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 75 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 85,70 | 86,42 | 87,13 | | 87,85 | | 88,57 | | 89,28 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 14,29 | 20 | 25 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 79.560.000 | | 80.060.000 | | 81.270.000 | | 82.950.000 | | 84.910.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,47 | 1 | 1 | 63.160.000 | 1 | 63.875.000 | 1 | 64.840.000 | 1 | 66.180.000 | 1 | 67.745.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 75 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 5.000.000 | | 5.060.000 | | 5.140.000 | | 5.245.000 | | 5.370.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 434 | 383 | 258 | 5.000.000 | 228 | 5.060.000 | 205 | 5.140.000 | 188 | 5.245.000 | 174 | 5.370.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 1.960.000 | | 1.985.000 | | 2.015.000 | | 2.060.000 | | 2.110.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 490 | 461 | 481 | 1.960.000 | 488 | 1.985.000 | 491 | 2.015.000 | 494 | 2.060.000 | 496 | 2.110.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 50.000.000 | | 50.555.000 | | 51.310.000 | | 52.360.000 | | 53.590.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.555.000 | 12 | 51.310.000 | 12 | 52.360.000 | 12 | 53.590.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 4.500.000 | | 4.550.000 | | 4.620.000 | | 4.715.000 | | 4.830.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 44 | 4.500.000 | 39 | 4.550.000 | 35 | 4.620.000 | 32 | 4.715.000 | 30 | 4.830.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.215.000 | 0 | 1.235.000 | 0 | 1.265.000 | 0 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 500.000 | | 510.000 | | 520.000 | | 535.000 | | 550.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 510.000 | 0 | 520.000 | 0 | 535.000 | 0 | 550.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 95,85 | 95 | 95 | 11.100.000 | 95 | 10.825.000 | 95 | 10.990.000 | 95 | 11.215.000 | 95 | 11.480.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 6.600.000 | | 6.675.000 | | 6.775.000 | | 6.915.000 | | 7.080.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 6.600.000 | 12 | 6.675.000 | 12 | 6.775.000 | 12 | 6.915.000 | 12 | 7.080.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 4.500.000 | | 4.150.000 | | 4.215.000 | | 4.300.000 | | 4.400.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 4.500.000 | 12 | 4.150.000 | 12 | 4.215.000 | 12 | 4.300.000 | 12 | 4.400.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 3404 | 3425 | 3446 | 5.300.000 | 3467 | 5.360.000 | 3488 | 5.440.000 | 3509 | 5.555.000 | 3530 | 5.685.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 5.300.000 | | 5.360.000 | | 5.440.000 | | 5.555.000 | | 5.685.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 5.300.000 | 12 | 5.360.000 | 12 | 5.440.000 | 12 | 5.555.000 | 12 | 5.685.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 21.000.000 | 30 | 21.250.000 | 35 | 21.580.000 | 40 | 22.035.000 | 45 | 22.560.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 55,03 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 21.000.000 | | 21.250.000 | | 21.580.000 | | 22.035.000 | | 22.560.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 102 | 100 | 100 | 21.000.000 | 100 | 21.250.000 | 100 | 21.580.000 | 100 | 22.035.000 | 100 | 22.560.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 115,42 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 5.600.000 | | 5.665.000 | | 5.750.000 | | 5.870.000 | | 6.010.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 19.584 | 1.219 | 19.630 | 5.600.000 | 19.614 | 5.665.000 | 19.598 | 5.750.000 | 19.582 | 5.870.000 | 19.566 | 6.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.281 | 3.774 | 5.340 | 2.000.000 | 5.420 | 2.025.000 | 5.501 | 2.060.000 | 5.584 | 2.105.000 | 5.668 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.290 | 1.262 | 1.262 | 1.000.000 | 1.263 | 1.015.000 | 1.263 | 1.035.000 | 1.263 | 1.060.000 | 1.263 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.800.000 | | 2.835.000 | | 2.880.000 | | 2.940.000 | | 3.010.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 559 | 485 | 485 | 2.800.000 | 486 | 2.835.000 | 486 | 2.880.000 | 487 | 2.940.000 | 487 | 3.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 9.600.000 | | 9.710.000 | | 9.855.000 | | 10.060.000 | | 10.300.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 39 | 38 | 39 | 9.600.000 | 40 | 9.710.000 | 41 | 9.855.000 | 42 | 10.060.000 | 43 | 10.300.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 23.100.000 | | 29.860.000 | | 30.310.000 | | 30.935.000 | | 31.670.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 25 | 75 | 80 | 23.100.000 | 85 | 29.860.000 | 90 | 30.310.000 | 95 | 30.935.000 | 100 | 31.670.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 23.100.000 | | 23.360.000 | | 23.710.000 | | 24.195.000 | | 24.765.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | | 12 | 15 | 23.100.000 | 18 | 23.360.000 | 21 | 23.710.000 | 24 | 24.195.000 | 27 | 24.765.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 23.100.000 | | 23.360.000 | | 23.710.000 | | 24.195.000 | | 24.765.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 12 | 4 | 23.100.000 | 4 | 23.360.000 | 4 | 23.710.000 | 4 | 24.195.000 | 4 | 24.765.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0004 - Puskesmas Bantaran** | | | | | **4.544.742.797** | | **4.602.155.000** | | **4.670.815.000** | | **4.766.170.000** | | **4.877.755.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.808.494.997 | | 3.850.770.000 | | 3.908.150.000 | | 3.987.880.000 | | 4.081.200.000 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 88,87 | 89 | 90 | 3.808.494.997 | 91 | 3.850.770.000 | 92 | 3.908.150.000 | 93 | 3.987.880.000 | 94 | 4.081.200.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 3.808.494.997 | | 3.850.770.000 | | 3.908.150.000 | | 3.987.880.000 | | 4.081.200.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 4 | 4 | 4 | 3.808.494.997 | 4 | 3.850.770.000 | 4 | 3.908.150.000 | 4 | 3.987.880.000 | 5 | 4.081.200.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 3.808.494.997 | | 3.850.770.000 | | 3.908.150.000 | | 3.987.880.000 | | 4.081.200.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 725.247.800 | | 733.760.000 | | 744.770.000 | | 760.020.000 | | 777.850.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 89.221.000 | 100 | 90.215.000 | 100 | 91.560.000 | 100 | 93.430.000 | 100 | 95.620.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 89.221.000 | | 90.215.000 | | 91.560.000 | | 93.430.000 | | 95.620.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 91,83 | 91,9 | 93,32 | 89.221.000 | 94,74 | 90.215.000 | 96,16 | 91.560.000 | 97,58 | 93.430.000 | 99 | 95.620.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 89.221.000 | | 90.215.000 | | 91.560.000 | | 93.430.000 | | 95.620.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 89.221.000 | 4 | 90.215.000 | 4 | 91.560.000 | 4 | 93.430.000 | 4 | 95.620.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 13 | 11 | 11 | 383.126.800 | 11 | 387.400.000 | 11 | 393.200.000 | 10 | 401.240.000 | 10 | 410.645.000 | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 2,97 | 2,67 | 2,41 | | 2,17 | | 1,95 | | 1,75 | | 1,58 | | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 9,99 | 9,84 | 9,69 | | 9,54 | | 8,81 | | 8,08 | | 7,64 | | |
| | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | | 0,8 | | 0,75 | | 0,7 | | 0,7 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 383.126.800 | | 387.400.000 | | 393.200.000 | | 401.240.000 | | 410.645.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 92,09 | 92,59 | 93,09 | 163.726.800 | 93,59 | 165.545.000 | 95,09 | 168.015.000 | 95,59 | 171.445.000 | 96,09 | 175.460.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 163.726.800 | | 165.545.000 | | 168.015.000 | | 171.445.000 | | 175.460.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 163.726.800 | 12 | 165.545.000 | 12 | 168.015.000 | 12 | 171.445.000 | 12 | 175.460.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 63,64 | 66,64 | 69,64 | 219.400.000 | 72,64 | 221.855.000 | 75,64 | 225.185.000 | 78,64 | 229.795.000 | 81,64 | 235.185.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 89,42 | 89,92 | 90,42 | | 90,92 | | 91,42 | | 91,92 | | 92,42 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 96.000.000 | | 97.070.000 | | 98.520.000 | | 100.530.000 | | 102.885.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 512 | 424 | 596 | 96.000.000 | 592 | 97.070.000 | 588 | 98.520.000 | 584 | 100.530.000 | 580 | 102.885.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 596 | 605 | 596 | 2.400.000 | 592 | 2.430.000 | 588 | 2.470.000 | 584 | 2.525.000 | 580 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 583 | 583 | 583 | 2.000.000 | 579 | 2.025.000 | 575 | 2.060.000 | 571 | 2.105.000 | 567 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 10.000.000 | | 10.115.000 | | 10.270.000 | | 10.480.000 | | 10.730.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan | 2.592 | 2.281 | 2.675 | 10.000.000 | 2.659 | 10.115.000 | 2.643 | 10.270.000 | 2.627 | 10.480.000 | 2.611 | 10.730.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 94.600.000 | | 95.655.000 | | 97.085.000 | | 99.070.000 | | 101.390.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5.143 | 5.290 | 5.554 | 94.600.000 | 5.572 | 95.655.000 | 5.590 | 97.085.000 | 5.608 | 99.070.000 | 5.627 | 101.390.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 14.400.000 | | 14.560.000 | | 14.780.000 | | 15.085.000 | | 15.440.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 14.400.000 | 4 | 14.560.000 | 4 | 14.780.000 | 4 | 15.085.000 | 4 | 15.440.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 117 | 95 | 96 | 195.900.000 | 97 | 198.495.000 | 98 | 201.480.000 | 99 | 205.610.000 | 100 | 210.435.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,158 | 0,1 | 0,05 | | 0,049 | | 0,029 | | 0,019 | | 0,009 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 60 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 40 | 48,33 | 56,67 | | 65 | | 73,33 | | 81,67 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 10 | 15 | 20 | | 25 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 195.900.000 | | 198.495.000 | | 201.480.000 | | 205.610.000 | | 210.435.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,99 | 1 | 1 | 141.500.000 | 1 | 143.350.000 | 1 | 145.505.000 | 1 | 148.490.000 | 1 | 151.975.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 60 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 13.000.000 | | 13.145.000 | | 13.345.000 | | 13.620.000 | | 13.940.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 587 | 565 | 381 | 13.000.000 | 337 | 13.145.000 | 303 | 13.345.000 | 277 | 13.620.000 | 257 | 13.940.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 676 | 650 | 679 | 3.000.000 | 688 | 3.035.000 | 692 | 3.085.000 | 696 | 3.150.000 | 700 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 120.000.000 | | 121.600.000 | | 123.410.000 | | 125.930.000 | | 128.880.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 120.000.000 | 12 | 121.600.000 | 12 | 123.410.000 | 12 | 125.930.000 | 12 | 128.880.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan | 0 | 0 | 108 | 2.000.000 | 93 | 2.025.000 | 82 | 2.060.000 | 74 | 2.105.000 | 67 | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | kesehatan sesuai standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 43 | 2.000.000 | 47 | 2.025.000 | 58 | 2.060.000 | 67 | 2.105.000 | 77 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.500.000 | | 1.520.000 | | 1.545.000 | | 1.580.000 | | 1.620.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.500.000 | 8 | 1.520.000 | 8 | 1.545.000 | 8 | 1.580.000 | 8 | 1.620.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 94,93 | 95 | 95 | 37.400.000 | 95 | 37.955.000 | 95 | 38.525.000 | 95 | 39.310.000 | 95 | 40.230.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 23.400.000 | | 23.660.000 | | 24.015.000 | | 24.505.000 | | 25.080.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | 12 | 12 | 23.400.000 | 12 | 23.660.000 | 12 | 24.015.000 | 12 | 24.505.000 | 12 | 25.080.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 14.000.000 | | 14.295.000 | | 14.510.000 | | 14.805.000 | | 15.150.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 14.000.000 | 12 | 14.295.000 | 12 | 14.510.000 | 12 | 14.805.000 | 12 | 15.150.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 6484 | 6514 | 6544 | 17.000.000 | 6574 | 17.190.000 | 6604 | 17.450.000 | 6634 | 17.810.000 | 6664 | 18.230.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 17.000.000 | | 17.190.000 | | 17.450.000 | | 17.810.000 | | 18.230.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 17.000.000 | 12 | 17.190.000 | 12 | 17.450.000 | 12 | 17.810.000 | 12 | 18.230.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 57.000.000 | 30 | 57.650.000 | 35 | 58.530.000 | 40 | 59.740.000 | 45 | 61.150.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 122,58 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 57.000.000 | | 57.650.000 | | 58.530.000 | | 59.740.000 | | 61.150.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 57.000.000 | 100 | 57.650.000 | 100 | 58.530.000 | 100 | 59.740.000 | 100 | 61.150.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 115 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 28.216 | 24.269 | 28.194 | 2.000.000 | 28.171 | 2.025.000 | 28.148 | 2.060.000 | 28.125 | 2.105.000 | 28.103 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 24.000.000 | | 24.270.000 | | 24.635.000 | | 25.140.000 | | 25.730.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6.207 | 5.940 | 7.308 | 24.000.000 | 7.418 | 24.270.000 | 7.529 | 24.635.000 | 7.642 | 25.140.000 | 7.757 | 25.730.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 6.000.000 | | 6.070.000 | | 6.165.000 | | 6.295.000 | | 6.445.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.228 | 3.814 | 3.815 | 6.000.000 | 3.816 | 6.070.000 | 3.817 | 6.165.000 | 3.817 | 6.295.000 | 3.818 | 6.445.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 6.000.000 | | 6.070.000 | | 6.165.000 | | 6.295.000 | | 6.445.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 746 | 702 | 703 | 6.000.000 | 703 | 6.070.000 | 704 | 6.165.000 | 705 | 6.295.000 | 705 | 6.445.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 19.000.000 | | 19.215.000 | | 19.505.000 | | 19.905.000 | | 20.375.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 138 | 114 | 144 | 19.000.000 | 147 | 19.215.000 | 150 | 19.505.000 | 154 | 19.905.000 | 158 | 20.375.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 11.000.000 | | 17.625.000 | | 17.895.000 | | 18.270.000 | | 18.705.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 100 | 75 | 80 | 11.000.000 | 85 | 17.625.000 | 90 | 17.895.000 | 95 | 18.270.000 | 100 | 18.705.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 11.000.000 | | 11.125.000 | | 11.295.000 | | 11.530.000 | | 11.800.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | | 12 | 15 | 11.000.000 | 18 | 11.125.000 | 21 | 11.295.000 | 24 | 11.530.000 | 27 | 11.800.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 11.000.000 | | 11.125.000 | | 11.295.000 | | 11.530.000 | | 11.800.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan | | 12 | 4 | 11.000.000 | 4 | 11.125.000 | 4 | 11.295.000 | 4 | 11.530.000 | 4 | 11.800.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0005 - Puskesmas Leces** | | | | | **4.959.909.074** | | **5.021.520.000** | | **5.096.410.000** | | **5.200.440.000** | | **5.322.180.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.295.767.074,00 | | 4.343.455.000,00 | | 4.408.175.000,00 | | 4.498.105.000,00 | | 4.603.365.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 92,47 | 93 | 94 | 4.295.767.074 | 95 | 4.343.455.000 | 95 | 4.408.175.000 | 95 | 4.498.105.000 | 95 | 4.603.365.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 4.295.767.074 | | 4.343.455.000 | | 4.408.175.000 | | 4.498.105.000 | | 4.603.365.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 4 | 4 | 4 | 4.295.767.074 | 4 | 4.343.455.000 | 4 | 4.408.175.000 | 4 | 4.498.105.000 | 5 | 4.603.365.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 4.295.767.074 | | 4.343.455.000 | | 4.408.175.000 | | 4.498.105.000 | | 4.603.365.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 4.295.767.074 | 1 | 4.343.455.000 | 1 | 4.408.175.000 | 1 | 4.498.105.000 | 1 | 4.603.365.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 652.542.000 | | 659.835.000 | | 669.730.000 | | 683.445.000 | | 699.475.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 138.282.000 | 100 | 139.820.000 | 100 | 141.905.000 | 100 | 144.800.000 | 100 | 148.190.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 138.282.000 | | 139.820.000 | | 141.905.000 | | 144.800.000 | | 148.190.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 94,89 | 94,9 | 95,72 | 138.282.000 | 96,54 | 139.820.000 | 97,36 | 141.905.000 | 98,18 | 144.800.000 | 99 | 148.190.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 138.282.000 | | 139.820.000 | | 141.905.000 | | 144.800.000 | | 148.190.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 138.282.000 | 4 | 139.820.000 | 4 | 141.905.000 | 4 | 144.800.000 | 4 | 148.190.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 2,97 | 2,67 | 2,41 | 320.300.000 | 2,17 | 323.875.000 | 1,95 | 328.725.000 | 1,75 | 335.450.000 | 1,58 | 343.310.000 | |
| | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | | 0,8 | | 0,75 | | 0,7 | | 0,7 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 13 | 11 | 11 | | 11 | | 11 | | 10 | | 10 | | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 9,99 | 9,84 | 9,69 | | 9,54 | | 8,81 | | 8,08 | | 7,64 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 320.300.000 | | 323.875.000 | | 328.725.000 | | 335.450.000 | | 343.310.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 86,74 | 88,24 | 89,74 | 212.900.000 | 91,24 | 215.265.000 | 91,29 | 218.475.000 | 91,34 | 222.935.000 | 91,39 | 228.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 212.900.000 | | 215.265.000 | | 218.475.000 | | 222.935.000 | | 228.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 212.900.000 | 12 | 215.265.000 | 12 | 218.475.000 | 12 | 222.935.000 | 12 | 228.155.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 62,74 | 65,74 | 68,74 | 107.400.000 | 71,74 | 108.610.000 | 74,74 | 110.250.000 | 77,74 | 112.515.000 | 80,74 | 115.155.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 80,69 | 81,19 | 81,69 | | 82,19 | | 82,69 | | 83,19 | | 83,69 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 44.000.000 | | 44.490.000 | | 45.155.000 | | 46.080.000 | | 47.160.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 422 | 454 | 488 | 44.000.000 | 485 | 44.490.000 | 482 | 45.155.000 | 479 | 46.080.000 | 476 | 47.160.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 488 | 551 | 488 | 1.000.000 | 485 | 1.015.000 | 482 | 1.035.000 | 479 | 1.060.000 | 476 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 468 | 527 | 468 | 2.000.000 | 465 | 2.025.000 | 462 | 2.060.000 | 459 | 2.105.000 | 456 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 19.500.000 | | 19.720.000 | | 20.015.000 | | 20.425.000 | | 20.905.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.010 | 2.008 | 2.025 | 19.500.000 | 2.013 | 19.720.000 | 2.001 | 20.015.000 | 1.989 | 20.425.000 | 1.977 | 20.905.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 35.200.000 | | 35.595.000 | | 36.130.000 | | 36.870.000 | | 37.735.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5.342 | 5.762 | 5.342 | 35.200.000 | 5.360 | 35.595.000 | 5.378 | 36.130.000 | 5.396 | 36.870.000 | 5.414 | 37.735.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 5.700.000 | | 5.765.000 | | 5.855.000 | | 5.975.000 | | 6.115.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 5.700.000 | 4 | 5.765.000 | 4 | 5.855.000 | 4 | 5.975.000 | 4 | 6.115.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 117 | 95 | 96 | 141.760.000 | 97 | 143.350.000 | 98 | 145.505.000 | 99 | 148.500.000 | 100 | 151.990.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,158 | 0,1 | 0,05 | | 0,049 | | 0,029 | | 0,019 | | 0,009 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 60 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 40 | 48,33 | 56,67 | | 65 | | 73,33 | | 81,67 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 10 | 15 | 20 | | 25 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 141.760.000 | | 143.350.000 | | 145.505.000 | | 148.500.000 | | 151.990.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,27 | 1 | 1 | 92.360.000 | 1 | 93.395.000 | 1 | 94.800.000 | 1 | 96.750.000 | 1 | 99.020.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | 81 | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 3.500.000 | | 3.540.000 | | 3.595.000 | | 3.670.000 | | 3.760.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang | 486 | 467 | 315 | 3.500.000 | 278 | 3.540.000 | 250 | 3.595.000 | 229 | 3.670.000 | 213 | 3.760.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 708 | 666 | 695 | 1.200.000 | 705 | 1.215.000 | 710 | 1.235.000 | 713 | 1.265.000 | 717 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 82.260.000 | | 83.175.000 | | 84.415.000 | | 86.135.000 | | 88.150.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 82.260.000 | 12 | 83.175.000 | 12 | 84.415.000 | 12 | 86.135.000 | 12 | 88.150.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 48 | 3.000.000 | 42 | 3.035.000 | 38 | 3.085.000 | 35 | 3.150.000 | 32 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 35 | 1.200.000 | 38 | 1.215.000 | 46 | 1.235.000 | 54 | 1.265.000 | 61 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.200.000 | 8 | 1.215.000 | 8 | 1.235.000 | 8 | 1.265.000 | 8 | 1.295.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 83,98 | 95 | 95 | 36.500.000 | 95 | 36.910.000 | 95 | 37.465.000 | 95 | 38.235.000 | 95 | 39.135.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 29.000.000 | | 29.325.000 | | 29.765.000 | | 30.375.000 | | 31.090.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 29.000.000 | 12 | 29.325.000 | 12 | 29.765.000 | 12 | 30.375.000 | 12 | 31.090.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 7.500.000 | | 7.585.000 | | 7.700.000 | | 7.860.000 | | 8.045.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 7.500.000 | 12 | 7.585.000 | 12 | 7.700.000 | 12 | 7.860.000 | 12 | 8.045.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 6640 | 6670 | 6700 | 12.900.000 | 6730 | 13.045.000 | 6760 | 13.240.000 | 6790 | 13.515.000 | 6820 | 13.835.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 12.900.000 | | 13.045.000 | | 13.240.000 | | 13.515.000 | | 13.835.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 12.900.000 | 12 | 13.045.000 | 12 | 13.240.000 | 12 | 13.515.000 | 12 | 13.835.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 52.200.000 | 30 | 52.790.000 | 35 | 53.595.000 | 40 | 54.695.000 | 45 | 55.985.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 122,58 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 52.200.000 | | 52.790.000 | | 53.595.000 | | 54.695.000 | | 55.985.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 52.200.000 | 100 | 52.790.000 | 100 | 53.595.000 | 100 | 54.695.000 | 100 | 55.985.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 146 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 26.000.000 | | 26.290.000 | | 26.685.000 | | 27.230.000 | | 27.870.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 24.550 | 23.668 | 24.531 | 26.000.000 | 24.511 | 26.290.000 | 24.491 | 26.685.000 | 24.471 | 27.230.000 | 24.451 | 27.870.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 1.800.000 | | 1.820.000 | | 1.850.000 | | 1.890.000 | | 1.935.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5.244 | 4.731 | 5.348 | 1.800.000 | 5.428 | 1.820.000 | 5.509 | 1.850.000 | 5.592 | 1.890.000 | 5.676 | 1.935.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 5.000.000 | | 5.060.000 | | 5.140.000 | | 5.245.000 | | 5.370.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.821 | 7.630 | 7.632 | 5.000.000 | 7.633 | 5.060.000 | 7.635 | 5.140.000 | 7.637 | 5.245.000 | 7.639 | 5.370.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 5.000.000 | | 5.060.000 | | 5.140.000 | | 5.245.000 | | 5.370.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 650 | 661 | 662 | 5.000.000 | 662 | 5.060.000 | 663 | 5.140.000 | 664 | 5.245.000 | 664 | 5.370.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 14.400.000 | | 14.560.000 | | 14.780.000 | | 15.085.000 | | 15.440.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 90 | 83 | 91 | 14.400.000 | 93 | 14.560.000 | 95 | 14.780.000 | 97 | 15.085.000 | 99 | 15.440.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 11.600.000 | | 18.230.000 | | 18.505.000 | | 18.890.000 | | 19.340.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 100 | 75 | 80 | 11.600.000 | 85 | 18.230.000 | 90 | 18.505.000 | 95 | 18.890.000 | 100 | 19.340.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 50 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 11.600.000 | | 11.730.000 | | 11.905.000 | | 12.150.000 | | 12.435.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | | 12 | 15 | 11.600.000 | 18 | 11.730.000 | 21 | 11.905.000 | 24 | 12.150.000 | 27 | 12.435.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 11.600.000 | | 11.730.000 | | 11.905.000 | | 12.150.000 | | 12.435.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 11.600.000 | 4 | 11.730.000 | 4 | 11.905.000 | 4 | 12.150.000 | 4 | 12.435.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0006 - Puskesmas Jorongan** | | | | | **1.551.934.125** | | **1.575.720.000** | | **1.599.260.000** | | **1.631.950.000** | | **1.670.200.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 1.191.304.125,00 | | 1.204.530.000,00 | | 1.222.480.000,00 | | 1.247.420.000,00 | | 1.276.610.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 86,6 | 86 | 87 | 1.191.304.125 | 88 | 1.204.530.000 | 89 | 1.222.480.000 | 90 | 1.247.420.000 | 90 | 1.276.610.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 1.191.304.125 | | 1.204.530.000 | | 1.222.480.000 | | 1.247.420.000 | | 1.276.610.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 4 | 4 | 4 | 1.191.304.125 | 4 | 1.204.530.000 | 4 | 1.222.480.000 | 4 | 1.247.420.000 | 5 | 1.276.610.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 1.191.304.125 | | 1.204.530.000 | | 1.222.480.000 | | 1.247.420.000 | | 1.276.610.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 1.191.304.125 | 1 | 1.204.530.000 | 1 | 1.222.480.000 | 1 | 1.247.420.000 | 1 | 1.276.610.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 343.830.000 | | 347.700.000 | | 352.935.000 | | 360.190.000 | | 368.670.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 45.958.000 | 100 | 46.470.000 | 100 | 47.165.000 | 100 | 48.130.000 | 100 | 49.260.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 45.958.000 | | 46.470.000 | | 47.165.000 | | 48.130.000 | | 49.260.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 86,9 | 86,9 | 89,32 | 45.958.000 | 91,74 | 46.470.000 | 94,16 | 47.165.000 | 96,56 | 48.130.000 | 99 | 49.260.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 45.958.000 | | 46.470.000 | | 47.165.000 | | 48.130.000 | | 49.260.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 45.958.000 | 4 | 46.470.000 | 4 | 47.165.000 | 4 | 48.130.000 | 4 | 49.260.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 6,53 | 5,88 | 5,29 | 168.912.000 | 4,76 | 170.800.000 | 4,28 | 173.360.000 | 3,86 | 176.915.000 | 3,47 | 181.070.000 | |
| | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 5 | 5 | 5 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 17,13 | 16,82 | 16,51 | | 16,21 | | 15,6 | | 14,37 | | 13,76 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 168.912.000 | | 170.800.000 | | 173.360.000 | | 176.915.000 | | 181.070.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 99,46 | 99,46 | 99,46 | 105.432.000 | 99,46 | 106.605.000 | 99,46 | 108.195.000 | 99,46 | 110.405.000 | 99,46 | 112.990.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 105.432.000 | | 106.605.000 | | 108.195.000 | | 110.405.000 | | 112.990.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 105.432.000 | 12 | 106.605.000 | 12 | 108.195.000 | 12 | 110.405.000 | 12 | 112.990.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 81,92 | 82,92 | 83,92 | 63.480.000 | 84,92 | 64.195.000 | 85,92 | 65.165.000 | 86,92 | 66.510.000 | 87,92 | 68.080.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 96,44 | 96,44 | 96,44 | | 96,44 | | 96,44 | | 96,44 | | 96,44 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 14.880.000 | | 15.050.000 | | 15.275.000 | | 15.590.000 | | 15.955.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 314 | 251 | 341 | 14.880.000 | 339 | 15.050.000 | 337 | 15.275.000 | 335 | 15.590.000 | 333 | 15.955.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 400.000 | | 405.000 | | 415.000 | | 425.000 | | 435.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 341 | 294 | 341 | 400.000 | 339 | 405.000 | 337 | 415.000 | 335 | 425.000 | 333 | 435.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 298 | 302 | 298 | 3.000.000 | 296 | 3.035.000 | 294 | 3.085.000 | 292 | 3.150.000 | 290 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 19.800.000 | | 20.020.000 | | 20.320.000 | | 20.735.000 | | 21.225.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.049 | 1.179 | 1.049 | 19.800.000 | 1.043 | 20.020.000 | 1.037 | 20.320.000 | 1.031 | 20.735.000 | 1.025 | 21.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 21.100.000 | | 21.335.000 | | 21.655.000 | | 22.100.000 | | 22.620.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.408 | 2.574 | 2.696 | 21.100.000 | 2.705 | 21.335.000 | 2.714 | 21.655.000 | 2.723 | 22.100.000 | 2.732 | 22.620.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 4.300.000 | | 4.350.000 | | 4.415.000 | | 4.510.000 | | 4.620.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 4.300.000 | 4 | 4.350.000 | 4 | 4.415.000 | 4 | 4.510.000 | 4 | 4.620.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 140 | 95 | 96 | 93.600.000 | 97 | 94.665.000 | 98 | 96.095.000 | 99 | 98.075.000 | 100 | 100.395.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0 | 0,01 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0,05 | 0,04 | 0,03 | | 0,02 | | 0,01 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 0 | 15 | 30 | | 45 | | 60 | | 75 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 93.600.000 | | 94.665.000 | | 96.095.000 | | 98.075.000 | | 100.395.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,23 | 1 | 1 | 58.800.000 | 1 | 59.470.000 | 1 | 60.365.000 | 1 | 61.610.000 | 1 | 63.070.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 10.400.000 | | 10.520.000 | | 10.680.000 | | 10.900.000 | | 11.160.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 255 | 239 | 161 | 10.400.000 | 142 | 10.520.000 | 128 | 10.680.000 | 117 | 10.900.000 | 109 | 11.160.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 600.000 | | 610.000 | | 620.000 | | 635.000 | | 650.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 331 | 340 | 355 | 600.000 | 360 | 610.000 | 362 | 620.000 | 364 | 635.000 | 366 | 650.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 44.600.000 | | 45.095.000 | | 45.765.000 | | 46.700.000 | | 47.795.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 44.600.000 | 12 | 45.095.000 | 12 | 45.765.000 | 12 | 46.700.000 | 12 | 47.795.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 2.500.000 | | 2.530.000 | | 2.570.000 | | 2.625.000 | | 2.690.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 24 | 2.500.000 | 21 | 2.530.000 | 19 | 2.570.000 | 18 | 2.625.000 | 16 | 2.690.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 500.000 | | 510.000 | | 520.000 | | 535.000 | | 550.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 19 | 500.000 | 21 | 510.000 | 25 | 520.000 | 29 | 535.000 | 34 | 550.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 200.000 | | 205.000 | | 210.000 | | 215.000 | | 225.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 200.000 | 8 | 205.000 | 8 | 210.000 | 8 | 215.000 | 8 | 225.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 98,45 | 95 | 95 | 16.800.000 | 95 | 16.995.000 | 95 | 17.255.000 | 95 | 17.610.000 | 95 | 18.025.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 11.800.000 | | 11.935.000 | | 12.115.000 | | 12.365.000 | | 12.655.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 11.800.000 | 12 | 11.935.000 | 12 | 12.115.000 | 12 | 12.365.000 | 12 | 12.655.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 5.000.000 | | 5.060.000 | | 5.140.000 | | 5.245.000 | | 5.370.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.060.000 | 12 | 5.140.000 | 12 | 5.245.000 | 12 | 5.370.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 3915 | 3927 | 3939 | 18.000.000 | 3951 | 18.200.000 | 3963 | 18.475.000 | 3975 | 18.855.000 | 3987 | 19.300.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 18.000.000 | | 18.200.000 | | 18.475.000 | | 18.855.000 | | 19.300.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 18.000.000 | 12 | 18.200.000 | 12 | 18.475.000 | 12 | 18.855.000 | 12 | 19.300.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 35.360.000 | 30 | 35.765.000 | 35 | 36.315.000 | 40 | 37.070.000 | 45 | 37.945.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 87,84 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 35.360.000 | | 35.765.000 | | 36.315.000 | | 37.070.000 | | 37.945.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 146,7 | 100 | 100 | 35.360.000 | 100 | 35.765.000 | 100 | 36.315.000 | 100 | 37.070.000 | 100 | 37.945.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 124 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 16.160.000 | | 16.340.000 | | 16.585.000 | | 16.925.000 | | 17.325.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 13.254 | 9.152 | 13.244 | 16.160.000 | 13.233 | 16.340.000 | 13.222 | 16.585.000 | 13.211 | 16.925.000 | 13.200 | 17.325.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 3.200.000 | | 3.240.000 | | 3.290.000 | | 3.360.000 | | 3.440.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.852 | 2.814 | 2.895 | 3.200.000 | 2.938 | 3.240.000 | 2.982 | 3.290.000 | 3.027 | 3.360.000 | 3.072 | 3.440.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.175 | 2.325 | 2.326 | 2.000.000 | 2.326 | 2.025.000 | 2.327 | 2.060.000 | 2.327 | 2.105.000 | 2.328 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 362 | 461 | 461 | 2.000.000 | 462 | 2.025.000 | 462 | 2.060.000 | 463 | 2.105.000 | 463 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 12.000.000 | | 12.135.000 | | 12.320.000 | | 12.575.000 | | 12.870.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 38 | 23 | 41 | 12.000.000 | 42 | 12.135.000 | 43 | 12.320.000 | 44 | 12.575.000 | 45 | 12.870.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 16.800.000 | | 23.490.000 | | 23.845.000 | | 24.340.000 | | 24.920.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 16.800.000 | 85 | 23.490.000 | 90 | 23.845.000 | 95 | 24.340.000 | 100 | 24.920.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 16.800.000 | | 16.990.000 | | 17.245.000 | | 17.600.000 | | 18.015.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | | 12 | 15 | 16.800.000 | 18 | 16.990.000 | 21 | 17.245.000 | 24 | 17.600.000 | 27 | 18.015.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 16.800.000 | | 16.990.000 | | 17.245.000 | | 17.600.000 | | 18.015.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 16.800.000 | 4 | 16.990.000 | 4 | 17.245.000 | 4 | 17.600.000 | 4 | 18.015.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0007 - Puskesmas Tegalsiwalan** | | | | | **3.326.530.605** | | **3.374.005.000** | | **3.424.335.000** | | **3.494.270.000** | | **3.576.090.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.625.002.005,00 | | 2.654.140.000,00 | | 2.693.690.000,00 | | 2.748.645.000,00 | | 2.812.965.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 91,3 | 91 | 91 | 2.625.002.005 | 91 | 2.654.140.000 | 91 | 2.693.690.000 | 91 | 2.748.645.000 | 91 | 2.812.965.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.625.002.005 | | 2.654.140.000 | | 2.693.690.000 | | 2.748.645.000 | | 2.812.965.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 2.625.002.005 | 4 | 2.654.140.000 | 4 | 2.693.690.000 | 4 | 2.748.645.000 | 5 | 2.812.965.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.625.002.005 | | 2.654.140.000 | | 2.693.690.000 | | 2.748.645.000 | | 2.812.965.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.625.002.005 | 1 | 2.654.140.000 | 1 | 2.693.690.000 | 1 | 2.748.645.000 | 1 | 2.812.965.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 697.528.600 | | 709.320.000 | | 719.935.000 | | 734.690.000 | | 751.925.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 119.639.800 | 100 | 120.970.000 | 100 | 122.775.000 | 100 | 125.280.000 | 100 | 128.215.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 119.639.800 | | 120.970.000 | | 122.775.000 | | 125.280.000 | | 128.215.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 93,86 | 93,9 | 94,92 | 119.639.800 | 95,94 | 120.970.000 | 96,96 | 122.775.000 | 97,97 | 125.280.000 | 99 | 128.215.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 119.639.800 | | 120.970.000 | | 122.775.000 | | 125.280.000 | | 128.215.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 119.639.800 | 4 | 120.970.000 | 4 | 122.775.000 | 4 | 125.280.000 | 4 | 128.215.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 1,27 | 1,11 | 0,96 | 328.448.800 | 0,8 | 336.105.000 | 0,64 | 341.125.000 | 0,48 | 348.105.000 | 0,32 | 356.270.000 | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 9 | 9 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | |
| | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | | 0,8 | | 0,75 | | 0,7 | | 0,7 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 10,05 | 9,05 | 8,14 | | 7,33 | | 6,59 | | 6,59 | | 6,59 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 328.448.800 | | 336.105.000 | | 341.125.000 | | 348.105.000 | | 356.270.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 88,83 | 90,33 | 91,83 | 147.248.800 | 93,33 | 148.885.000 | 93,38 | 151.105.000 | 93,43 | 154.190.000 | 93,48 | 157.800.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 147.248.800 | | 148.885.000 | | 151.105.000 | | 154.190.000 | | 157.800.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 147.248.800 | 12 | 148.885.000 | 12 | 151.105.000 | 12 | 154.190.000 | 12 | 157.800.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 66,46 | 69,46 | 72,46 | 181.200.000 | 75,46 | 187.220.000 | 78,46 | 190.020.000 | 81,46 | 193.915.000 | 84,46 | 198.470.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 89,9 | 90,4 | 90,9 | | 91,4 | | 91,9 | | 92,4 | | 92,9 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 120.000.000 | | 121.335.000 | | 123.145.000 | | 125.660.000 | | 128.605.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 452 | 529 | 542 | 120.000.000 | 538 | 121.335.000 | 534 | 123.145.000 | 530 | 125.660.000 | 526 | 128.605.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 4.800.000 | | 4.855.000 | | 4.930.000 | | 5.035.000 | | 5.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 542 | 572 | 542 | 4.800.000 | 538 | 4.855.000 | 534 | 4.930.000 | 530 | 5.035.000 | 526 | 5.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 4.800.000 | | 4.855.000 | | 4.930.000 | | 5.035.000 | | 5.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 543 | 546 | 543 | 4.800.000 | 539 | 4.855.000 | 535 | 4.930.000 | 531 | 5.035.000 | 527 | 5.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 3.600.000 | | 3.640.000 | | 3.695.000 | | 3.775.000 | | 3.865.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.186 | 2.084 | 2.186 | 3.600.000 | 2.173 | 3.640.000 | 2.160 | 3.695.000 | 2.147 | 3.775.000 | 2.134 | 3.865.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 48.000.000 | | 48.535.000 | | 49.260.000 | | 50.265.000 | | 51.445.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan | 4.391 | 4.638 | 4.745 | 48.000.000 | 4.761 | 48.535.000 | 4.777 | 49.260.000 | 4.793 | 50.265.000 | 4.809 | 51.445.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 136 | 95 | 96 | 158.200.000 | 97 | 159.975.000 | 98 | 162.375.000 | 99 | 165.715.000 | 100 | 169.610.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,131 | 0,1 | 0,05 | | 0,049 | | 0,029 | | 0,019 | | 0,009 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 25 | 35,83 | 46,67 | | 57,50 | | 68,33 | | 79,17 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 158.200.000 | | 159.975.000 | | 162.375.000 | | 165.715.000 | | 169.610.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,52 | 1 | 1 | 124.000.000 | 1 | 125.390.000 | 1 | 127.270.000 | 1 | 129.885.000 | 1 | 132.935.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 14.400.000 | | 14.560.000 | | 14.780.000 | | 15.085.000 | | 15.440.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 522 | 453 | 306 | 14.400.000 | 270 | 14.560.000 | 243 | 14.780.000 | 222 | 15.085.000 | 206 | 15.440.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 770 | 654 | 683 | 1.000.000 | 693 | 1.015.000 | 697 | 1.035.000 | 701 | 1.060.000 | 704 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 90.200.000 | | 91.205.000 | | 92.560.000 | | 94.450.000 | | 96.665.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 90.200.000 | 12 | 91.205.000 | 12 | 92.560.000 | 12 | 94.450.000 | 12 | 96.665.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 14.800.000 | | 14.965.000 | | 15.190.000 | | 15.500.000 | | 15.865.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 56 | 14.800.000 | 50 | 14.965.000 | 45 | 15.190.000 | 41 | 15.500.000 | 38 | 15.865.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 93 | 2.400.000 | 80 | 2.430.000 | 71 | 2.470.000 | 64 | 2.525.000 | 58 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.200.000 | 8 | 1.215.000 | 8 | 1.235.000 | 8 | 1.265.000 | 8 | 1.295.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 92,56 | 95 | 95 | 24.600.000 | 95 | 24.875.000 | 95 | 25.250.000 | 95 | 25.770.000 | 95 | 26.375.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 14.600.000 | | 14.765.000 | | 14.985.000 | | 15.295.000 | | 15.655.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 14.600.000 | 12 | 14.765.000 | 12 | 14.985.000 | 12 | 15.295.000 | 12 | 15.655.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 10.000.000 | | 10.110.000 | | 10.265.000 | | 10.475.000 | | 10.720.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.110.000 | 12 | 10.265.000 | 12 | 10.475.000 | 12 | 10.720.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 9.805 | 9.841 | 9.877 | 9.600.000 | 9.913 | 9.710.000 | 9.949 | 9.855.000 | 9.985 | 10.060.000 | 10.021 | 10.300.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 9.600.000 | | 9.710.000 | | 9.855.000 | | 10.060.000 | | 10.300.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 9.600.000 | 12 | 9.710.000 | 12 | 9.855.000 | 12 | 10.060.000 | 12 | 10.300.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 91.240.000 | 30 | 92.270.000 | 35 | 93.660.000 | 40 | 95.590.000 | 45 | 97.830.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 88,35 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 91.240.000 | | 92.270.000 | | 93.660.000 | | 95.590.000 | | 97.830.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 93 | 100 | 100 | 91.240.000 | 100 | 92.270.000 | 100 | 93.660.000 | 100 | 95.590.000 | 100 | 97.830.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 53 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 23.040.000 | | 23.300.000 | | 23.650.000 | | 24.135.000 | | 24.700.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 14.093 | 17.546 | 24.464 | 23.040.000 | 24.444 | 23.300.000 | 24.424 | 23.650.000 | 24.404 | 24.135.000 | 24.384 | 24.700.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 12.000.000 | | 12.135.000 | | 12.320.000 | | 12.575.000 | | 12.870.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5.401 | 5.805 | 5.856 | 12.000.000 | 5.944 | 12.135.000 | 6.033 | 12.320.000 | 6.123 | 12.575.000 | 6.215 | 12.870.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.584 | 1.953 | 1.953 | 2.400.000 | 1.954 | 2.430.000 | 1.954 | 2.470.000 | 1.955 | 2.525.000 | 1.955 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 612 | 341 | 341 | 2.400.000 | 342 | 2.430.000 | 342 | 2.470.000 | 342 | 2.525.000 | 343 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 51.400.000 | | 51.975.000 | | 52.750.000 | | 53.830.000 | | 55.090.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 82 | 73 | 90 | 51.400.000 | 92 | 51.975.000 | 94 | 52.750.000 | 96 | 53.830.000 | 98 | 55.090.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 4.000.000 | | 10.545.000 | | 10.710.000 | | 10.935.000 | | 11.200.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 4.000.000 | 85 | 10.545.000 | 90 | 10.710.000 | 95 | 10.935.000 | 100 | 11.200.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 4.000.000 | | 4.045.000 | | 4.110.000 | | 4.195.000 | | 4.295.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | | 12 | 15 | 4.000.000 | 18 | 4.045.000 | 21 | 4.110.000 | 24 | 4.195.000 | 27 | 4.295.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 4.000.000 | | 4.045.000 | | 4.110.000 | | 4.195.000 | | 4.295.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.045.000 | 4 | 4.110.000 | 4 | 4.195.000 | 4 | 4.295.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| **1.02.0.00.0.00.00.0008 - Puskesmas Banyuanyar** | | | | | **3.124.551.005** | | **3.165.775.000** | | **3.213.030.000** | | **3.278.630.000** | | **3.355.410.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.626.723.005,00 | | 2.655.880.000,00 | | 2.695.455.000,00 | | 2.750.445.000,00 | | 2.814.810.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 94,02 | 94 | 94 | 2.626.723.005 | 94 | 2.655.880.000 | 94 | 2.695.455.000 | 95 | 2.750.445.000 | 95 | 2.814.810.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.626.723.005 | | 2.655.880.000 | | 2.695.455.000 | | 2.750.445.000 | | 2.814.810.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 2.626.723.005 | 4 | 2.655.880.000 | 4 | 2.695.455.000 | 4 | 2.750.445.000 | 5 | 2.814.810.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.626.723.005 | | 2.655.880.000 | | 2.695.455.000 | | 2.750.445.000 | | 2.814.810.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.626.723.005 | 1 | 2.655.880.000 | 1 | 2.695.455.000 | 1 | 2.750.445.000 | 1 | 2.814.810.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 489.828.000 | | 495.305.000 | | 502.760.000 | | 513.060.000 | | 525.110.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 88.111.200 | 100 | 89.090.000 | 100 | 90.420.000 | 100 | 92.265.000 | 100 | 94.425.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 88.111.200 | | 89.090.000 | | 90.420.000 | | 92.265.000 | | 94.425.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 98,57 | 98,6 | 98,68 | 88.111.200 | 98,76 | 89.090.000 | 98,84 | 90.420.000 | 98,92 | 92.265.000 | 99 | 94.425.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 88.111.200 | | 89.090.000 | | 90.420.000 | | 92.265.000 | | 94.425.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 88.111.200 | 4 | 89.090.000 | 4 | 90.420.000 | 4 | 92.265.000 | 4 | 94.425.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 23,73 | 23,24 | 23 | 265.216.800 | 21,79 | 268.175.000 | 20,82 | 272.190.000 | 19,85 | 277.760.000 | 19,13 | 284.270.000 | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 2 | | 3 | | 2 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 12,53 | 11,28 | 10,15 | | 10 | | 9,22 | | 7,4 | | 6,66 | | |
| | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 265.216.800 | | 268.175.000 | | 272.190.000 | | 277.760.000 | | 284.270.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 90,16 | 90,66 | 91,16 | 186.816.800 | 91,66 | 188.895.000 | 93,16 | 191.710.000 | 93,66 | 195.625.000 | 94,16 | 200.205.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 186.816.800 | | 188.895.000 | | 191.710.000 | | 195.625.000 | | 200.205.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 186.816.800 | 12 | 188.895.000 | 12 | 191.710.000 | 12 | 195.625.000 | 12 | 200.205.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 77,04 | 79,04 | 81,04 | 78.400.000 | 83,04 | 79.280.000 | 85,04 | 80.480.000 | 87,04 | 82.135.000 | 89,04 | 84.065.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 95,66 | 95,66 | 95,66 | | 95,66 | | 95,66 | | 95,66 | | 95,66 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 43.200.000 | | 43.680.000 | | 44.335.000 | | 45.240.000 | | 46.300.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 400 | 408 | 447 | 43.200.000 | 444 | 43.680.000 | 441 | 44.335.000 | 438 | 45.240.000 | 435 | 46.300.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 800.000 | | 810.000 | | 825.000 | | 845.000 | | 865.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 447 | 440 | 447 | 800.000 | 444 | 810.000 | 441 | 825.000 | 438 | 845.000 | 435 | 865.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 441 | 442 | 441 | 2.000.000 | 438 | 2.025.000 | 435 | 2.060.000 | 432 | 2.105.000 | 429 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.400.000 | | 1.420.000 | | 1.445.000 | | 1.475.000 | | 1.510.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.915 | 1.806 | 1.915 | 1.400.000 | 1.904 | 1.420.000 | 1.893 | 1.445.000 | 1.882 | 1.475.000 | 1.871 | 1.510.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 18.400.000 | | 18.605.000 | | 18.885.000 | | 19.275.000 | | 19.730.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.634 | 3.638 | 4.012 | 18.400.000 | 4.025 | 18.605.000 | 4.038 | 18.885.000 | 4.051 | 19.275.000 | 4.064 | 19.730.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 12.600.000 | | 12.740.000 | | 12.930.000 | | 13.195.000 | | 13.505.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 12.600.000 | 4 | 12.740.000 | 4 | 12.930.000 | 4 | 13.195.000 | 4 | 13.505.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 160 | 95 | 96 | 109.500.000 | 97 | 110.730.000 | 98 | 112.415.000 | 99 | 114.720.000 | 100 | 117.425.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0 | 0,01 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 0 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 28,6 | 38,83 | 49,07 | | 59,30 | | 69,53 | | 79,77 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 109.500.000 | | 110.730.000 | | 112.415.000 | | 114.720.000 | | 117.425.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,64 | 1 | 1 | 88.100.000 | 1 | 89.090.000 | 1 | 90.445.000 | 1 | 92.295.000 | 1 | 94.470.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 444 | 385 | 260 | 3.000.000 | 229 | 3.035.000 | 206 | 3.085.000 | 188 | 3.150.000 | 175 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 512 | 451 | 471 | 3.000.000 | 478 | 3.035.000 | 480 | 3.085.000 | 483 | 3.150.000 | 486 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 80.000.000 | | 80.890.000 | | 82.100.000 | | 83.775.000 | | 85.740.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.890.000 | 12 | 82.100.000 | 12 | 83.775.000 | 12 | 85.740.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 700.000 | | 710.000 | | 725.000 | | 740.000 | | 760.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 79 | 700.000 | 68 | 710.000 | 60 | 725.000 | 54 | 740.000 | 49 | 760.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 700.000 | | 710.000 | | 725.000 | | 740.000 | | 760.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 22 | 700.000 | 25 | 710.000 | 30 | 725.000 | 34 | 740.000 | 39 | 760.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 700.000 | | 710.000 | | 725.000 | | 740.000 | | 760.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 700.000 | 8 | 710.000 | 8 | 725.000 | 8 | 740.000 | 8 | 760.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 94,33 | 95 | 95 | 12.000.000 | 95 | 12.135.000 | 95 | 12.320.000 | 95 | 12.575.000 | 95 | 12.870.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 4.700.000 | | 4.755.000 | | 4.830.000 | | 4.930.000 | | 5.050.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 4.700.000 | 12 | 4.755.000 | 12 | 4.830.000 | 12 | 4.930.000 | 12 | 5.050.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 7.300.000 | | 7.380.000 | | 7.490.000 | | 7.645.000 | | 7.820.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 7.300.000 | 12 | 7.380.000 | 12 | 7.490.000 | 12 | 7.645.000 | 12 | 7.820.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 8.225 | 8.253 | 8.281 | 9.400.000 | 8.309 | 9.505.000 | 8.337 | 9.650.000 | 8.365 | 9.850.000 | 8.393 | 10.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 9.400.000 | | 9.505.000 | | 9.650.000 | | 9.850.000 | | 10.085.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 9.400.000 | 12 | 9.505.000 | 12 | 9.650.000 | 12 | 9.850.000 | 12 | 10.085.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 27.000.000 | 30 | 27.310.000 | 35 | 27.735.000 | 40 | 28.315.000 | 45 | 28.990.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 62,00 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 27.000.000 | | 27.310.000 | | 27.735.000 | | 28.315.000 | | 28.990.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 100,8 | 100 | 100 | 27.000.000 | 100 | 27.310.000 | 100 | 27.735.000 | 100 | 28.315.000 | 100 | 28.990.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 126,54 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 9.000.000 | | 9.100.000 | | 9.240.000 | | 9.430.000 | | 9.655.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 20.633 | 14.126 | 20.617 | 9.000.000 | 20.601 | 9.100.000 | 20.585 | 9.240.000 | 20.569 | 9.430.000 | 20.553 | 9.655.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 4.400.000 | | 4.450.000 | | 4.520.000 | | 4.615.000 | | 4.725.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.613 | 4.582 | 5.174 | 4.400.000 | 5.252 | 4.450.000 | 5.331 | 4.520.000 | 5.411 | 4.615.000 | 5.492 | 4.725.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.380 | 5.303 | 5.304 | 2.000.000 | 5.305 | 2.025.000 | 5.307 | 2.060.000 | 5.308 | 2.105.000 | 5.309 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 580 | 572 | 573 | 2.000.000 | 573 | 2.025.000 | 574 | 2.060.000 | 574 | 2.105.000 | 575 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 9.600.000 | | 9.710.000 | | 9.855.000 | | 10.060.000 | | 10.300.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 38 | 38 | 42 | 9.600.000 | 43 | 9.710.000 | 44 | 9.855.000 | 45 | 10.060.000 | 46 | 10.300.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 8.000.000 | | 14.590.000 | | 14.815.000 | | 15.125.000 | | 15.490.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 100 | 75 | 80 | 8.000.000 | 85 | 14.590.000 | 90 | 14.815.000 | 95 | 15.125.000 | 100 | 15.490.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 8.000.000 | | 8.090.000 | | 8.215.000 | | 8.385.000 | | 8.585.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | | 12 | 15 | 8.000.000 | 18 | 8.090.000 | 21 | 8.215.000 | 24 | 8.385.000 | 27 | 8.585.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 8.000.000 | | 8.090.000 | | 8.215.000 | | 8.385.000 | | 8.585.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.090.000 | 4 | 8.215.000 | 4 | 8.385.000 | 4 | 8.585.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0009 - Puskesmas Klenang Kidul** | | | | | **2.578.825.240** | | **2.614.020.000** | | **2.653.045.000** | | **2.707.235.000** | | **2.770.625.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.143.649.240,00 | | 2.167.445.000,00 | | 2.199.740.000,00 | | 2.244.615.000,00 | | 2.297.140.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 89,11 | 90 | 90 | 2.143.649.240 | 91 | 2.167.445.000 | 91 | 2.199.740.000 | 92 | 2.244.615.000 | 92 | 2.297.140.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.143.649.240 | | 2.167.445.000 | | 2.199.740.000 | | 2.244.615.000 | | 2.297.140.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 2.143.649.240 | 4 | 2.167.445.000 | 4 | 2.199.740.000 | 4 | 2.244.615.000 | 5 | 2.297.140.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.143.649.240 | | 2.167.445.000 | | 2.199.740.000 | | 2.244.615.000 | | 2.297.140.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.143.649.240 | 1 | 2.167.445.000 | 1 | 2.199.740.000 | 1 | 2.244.615.000 | 1 | 2.297.140.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 429.496.000 | | 434.330.000 | | 440.870.000 | | 449.925.000 | | 460.485.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 57.676.000 | 100 | 58.320.000 | 100 | 59.190.000 | 100 | 60.400.000 | 100 | 61.815.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 57.676.000 | | 58.320.000 | | 59.190.000 | | 60.400.000 | | 61.815.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 57,79 | 85 | 87,8 | 57.676.000 | 90,6 | 58.320.000 | 93,4 | 59.190.000 | 96,2 | 60.400.000 | 99 | 61.815.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 57.676.000 | | 58.320.000 | | 59.190.000 | | 60.400.000 | | 61.815.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 57.676.000 | 4 | 58.320.000 | 4 | 59.190.000 | 4 | 60.400.000 | 4 | 61.815.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 17,38 | 17,11 | 16,84 | 250.200.000 | 16,58 | 252.995.000 | 16,04 | 256.785.000 | 14,94 | 262.045.000 | 14,17 | 268.190.000 | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 14,481044 | 13,03 | 11,73 | | 10,56 | | 9,5 | | 9,5 | | 9,5 | | |
| | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 250.200.000 | | 252.995.000 | | 256.785.000 | | 262.045.000 | | 268.190.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 135.040.000 | 98,74 | 136.540.000 | 98,74 | 138.575.000 | 98,74 | 141.405.000 | 98,74 | 144.715.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 135.040.000 | | 136.540.000 | | 138.575.000 | | 141.405.000 | | 144.715.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 135.040.000 | 12 | 136.540.000 | 12 | 138.575.000 | 12 | 141.405.000 | 12 | 144.715.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 67,39 | 70,39 | 73,39 | 115.160.000 | 76,39 | 116.455.000 | 79,39 | 118.210.000 | 82,39 | 120.640.000 | 85,39 | 123.475.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 102,54 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 77.560.000 | | 78.425.000 | | 79.595.000 | | 81.220.000 | | 83.125.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 304 | 261 | 368 | 77.560.000 | 365 | 78.425.000 | 362 | 79.595.000 | 359 | 81.220.000 | 356 | 83.125.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 13.000.000 | | 13.145.000 | | 13.345.000 | | 13.620.000 | | 13.940.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 368 | 346 | 368 | 13.000.000 | 365 | 13.145.000 | 362 | 13.345.000 | 359 | 13.620.000 | 356 | 13.940.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 364 | 332 | 364 | 1.000.000 | 361 | 1.015.000 | 358 | 1.035.000 | 355 | 1.060.000 | 353 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.363 | 1.376 | 1.399 | 1.000.000 | 1.391 | 1.015.000 | 1.383 | 1.035.000 | 1.375 | 1.060.000 | 1.367 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 17.200.000 | | 17.395.000 | | 17.655.000 | | 18.020.000 | | 18.445.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.155 | 3.201 | 3.463 | 17.200.000 | 3.474 | 17.395.000 | 3.484 | 17.655.000 | 3.497 | 18.020.000 | 3.509 | 18.445.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 5.400.000 | | 5.460.000 | | 5.545.000 | | 5.660.000 | | 5.795.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 5.400.000 | 4 | 5.460.000 | 4 | 5.545.000 | 4 | 5.660.000 | 4 | 5.795.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 138 | 95 | 96 | 101.020.000 | 97 | 102.170.000 | 98 | 103.720.000 | 99 | 105.860.000 | 100 | 108.350.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 14,3 | 26,92 | 39,53 | | 52,15 | | 64,77 | | 77,38 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | | | | | 101.020.000 | | 102.170.000 | | 103.720.000 | | 105.860.000 | | 108.350.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 2,15 | 1 | 1 | 76.820.000 | 1 | 77.690.000 | 1 | 78.870.000 | 1 | 80.495.000 | 1 | 82.385.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 4.800.000 | | 4.855.000 | | 4.930.000 | | 5.035.000 | | 5.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 321 | 327 | 221 | 4.800.000 | 195 | 4.855.000 | 175 | 4.930.000 | 160 | 5.035.000 | 149 | 5.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 410 | 421 | 440 | 1.000.000 | 446 | 1.015.000 | 449 | 1.035.000 | 451 | 1.060.000 | 453 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 67.520.000 | | 68.270.000 | | 69.290.000 | | 70.700.000 | | 72.355.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 67.520.000 | 12 | 68.270.000 | 12 | 69.290.000 | 12 | 70.700.000 | 12 | 72.355.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 51 | 2.000.000 | 45 | 2.025.000 | 40 | 2.060.000 | 37 | 2.105.000 | 34 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 500.000 | | 510.000 | | 520.000 | | 535.000 | | 550.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 7 | 500.000 | 8 | 510.000 | 9 | 520.000 | 11 | 535.000 | 13 | 550.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.000.000 | 8 | 1.015.000 | 8 | 1.035.000 | 8 | 1.060.000 | 8 | 1.085.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 94,61 | 95 | 95 | 8.400.000 | 95 | 8.500.000 | 95 | 8.630.000 | 95 | 8.810.000 | 95 | 9.020.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 1.900.000 | | 1.925.000 | | 1.955.000 | | 1.995.000 | | 2.045.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 1.900.000 | 12 | 1.925.000 | 12 | 1.955.000 | 12 | 1.995.000 | 12 | 2.045.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 6.500.000 | | 6.575.000 | | 6.675.000 | | 6.815.000 | | 6.975.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 6.500.000 | 12 | 6.575.000 | 12 | 6.675.000 | 12 | 6.815.000 | 12 | 6.975.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 4.829 | 4.857 | 4.885 | 15.800.000 | 4.913 | 15.980.000 | 4.941 | 16.220.000 | 4.969 | 16.555.000 | 4.997 | 16.945.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 15.800.000 | | 15.980.000 | | 16.220.000 | | 16.555.000 | | 16.945.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan | 4 | 12 | 12 | 15.800.000 | 12 | 15.980.000 | 12 | 16.220.000 | 12 | 16.555.000 | 12 | 16.945.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 20.600.000 | 30 | 20.845.000 | 35 | 21.175.000 | 40 | 21.620.000 | 45 | 22.130.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 50,112863 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 20.600.000 | | 20.845.000 | | 21.175.000 | | 21.620.000 | | 22.130.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 118 | 100 | 100 | 20.600.000 | 100 | 20.845.000 | 100 | 21.175.000 | 100 | 21.620.000 | 100 | 22.130.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 45,98 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 8.310 | 8.401 | 15.299 | 1.000.000 | 15.287 | 1.015.000 | 15.275 | 1.035.000 | 15.263 | 1.060.000 | 15.251 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 3.800.000 | | 3.845.000 | | 3.905.000 | | 3.985.000 | | 4.080.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.378 | 2.729 | 3.886 | 3.800.000 | 3.944 | 3.845.000 | 4.003 | 3.905.000 | 4.063 | 3.985.000 | 4.124 | 4.080.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.074 | 1.645 | 1.645 | 2.000.000 | 1.646 | 2.025.000 | 1.646 | 2.060.000 | 1.646 | 2.105.000 | 1.647 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 956 | 549 | 550 | 2.000.000 | 550 | 2.025.000 | 551 | 2.060.000 | 551 | 2.105.000 | 552 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 11.800.000 | | 11.935.000 | | 12.115.000 | | 12.365.000 | | 12.655.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 31 | 29 | 31 | 11.800.000 | 32 | 11.935.000 | 33 | 12.115.000 | 34 | 12.365.000 | 35 | 12.655.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 5.680.000 | | 12.245.000 | | 12.435.000 | | 12.695.000 | | 13.000.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 82,1 | 75 | 80 | 5.680.000 | 85 | 12.245.000 | 90 | 12.435.000 | 95 | 12.695.000 | 100 | 13.000.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 5.680.000 | | 5.745.000 | | 5.835.000 | | 5.955.000 | | 6.095.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 3 | 12 | 15 | 5.680.000 | 18 | 5.745.000 | 21 | 5.835.000 | 24 | 5.955.000 | 27 | 6.095.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan | | | | | 5.680.000 | | 5.745.000 | | 5.835.000 | | 5.955.000 | | 6.095.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 5.680.000 | 4 | 5.745.000 | 4 | 5.835.000 | 4 | 5.955.000 | 4 | 6.095.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0010 - Puskesmas Tiris** | | | | | **4.366.214.334** | | **4.421.230.000** | | **4.487.170.000** | | **4.578.775.000** | | **4.685.985.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.873.140.734,00 | | 3.916.135.000,00 | | 3.974.490.000,00 | | 4.055.570.000,00 | | 4.150.475.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 79,88 | 80 | 81 | 3.873.140.734 | 82 | 3.916.135.000 | 83 | 3.974.490.000 | 84 | 4.055.570.000 | 85 | 4.150.475.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 3.873.140.734 | | 3.916.135.000 | | 3.974.490.000 | | 4.055.570.000 | | 4.150.475.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 4 | 4 | 4 | 3.873.140.734 | 4 | 3.916.135.000 | 4 | 3.974.490.000 | 4 | 4.055.570.000 | 4 | 4.150.475.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 3.873.140.734 | | 3.916.135.000 | | 3.974.490.000 | | 4.055.570.000 | | 4.150.475.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 3.873.140.734 | 1 | 3.916.135.000 | 1 | 3.974.490.000 | 1 | 4.055.570.000 | 1 | 4.150.475.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 482.741.600 | | 488.145.000 | | 495.470.000 | | 505.635.000 | | 517.520.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 70.611.100 | 100 | 71.395.000 | 100 | 72.460.000 | 100 | 73.940.000 | 100 | 75.675.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 70.611.100 | | 71.395.000 | | 72.460.000 | | 73.940.000 | | 75.675.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 77,95 | 85 | 87,8 | 70.611.100 | 90,6 | 71.395.000 | 93,4 | 72.460.000 | 96,2 | 73.940.000 | 99 | 75.675.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 70.611.100 | | 71.395.000 | | 72.460.000 | | 73.940.000 | | 75.675.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 70.611.100 | 4 | 71.395.000 | 4 | 72.460.000 | 4 | 73.940.000 | 4 | 75.675.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 6,22 | 6,03 | 5,85 | 227.262.000 | 5,67 | 229.800.000 | 5,3 | 233.240.000 | 5,12 | 238.020.000 | 4,75 | 243.610.000 | |
| | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 2,98 | 2,68 | 2,41 | | 2,17 | | 1,96 | | 1,76 | | 1,58 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 10 | 10 | 9 | | 9 | | 9 | | 8 | | 6 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 227.262.000 | | 229.800.000 | | 233.240.000 | | 238.020.000 | | 243.610.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 101.534.000 | 97,2 | 102.665.000 | 97,2 | 104.195.000 | 97,2 | 106.325.000 | 97,2 | 108.815.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 101.534.000 | | 102.665.000 | | 104.195.000 | | 106.325.000 | | 108.815.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 101.534.000 | 12 | 102.665.000 | 12 | 104.195.000 | 12 | 106.325.000 | 12 | 108.815.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 64,73 | 67,73 | 69,73 | 125.728.000 | 71,73 | 127.135.000 | 73,73 | 129.045.000 | 75,73 | 131.695.000 | 77,73 | 134.795.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 80,39 | 80,89 | 81,39 | | 81,89 | | 82,39 | | 82,89 | | 83,39 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 31.500.000 | | 31.850.000 | | 32.325.000 | | 32.985.000 | | 33.760.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 583 | 539 | 583 | 31.500.000 | 579 | 31.850.000 | 575 | 32.325.000 | 571 | 32.985.000 | 567 | 33.760.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 3.128.000 | | 3.165.000 | | 3.215.000 | | 3.285.000 | | 3.365.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 464 | 547 | 583 | 3.128.000 | 579 | 3.165.000 | 575 | 3.215.000 | 571 | 3.285.000 | 567 | 3.365.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 455 | 488 | 455 | 2.000.000 | 452 | 2.025.000 | 449 | 2.060.000 | 446 | 2.105.000 | 443 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 2.700.000 | | 2.730.000 | | 2.775.000 | | 2.835.000 | | 2.905.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.033 | 2.001 | 2.033 | 2.700.000 | 2.021 | 2.730.000 | 2.009 | 2.775.000 | 1.997 | 2.835.000 | 1.985 | 2.905.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 76.800.000 | | 77.655.000 | | 78.815.000 | | 80.425.000 | | 82.310.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.149 | 3.217 | 4.490 | 76.800.000 | 4.505 | 77.655.000 | 4.520 | 78.815.000 | 4.535 | 80.425.000 | 4.550 | 82.310.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 9.600.000 | | 9.710.000 | | 9.855.000 | | 10.060.000 | | 10.300.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 9.600.000 | 4 | 9.710.000 | 4 | 9.855.000 | 4 | 10.060.000 | 4 | 10.300.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 147 | 95 | 96 | 144.228.500 | 97 | 145.845.000 | 98 | 148.040.000 | 99 | 151.080.000 | 100 | 154.635.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,055 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 22,2 | 33,5 | 44,8 | | 56,1 | | 67,4 | | 78,7 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 144.228.500 | | 145.845.000 | | 148.040.000 | | 151.080.000 | | 154.635.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,00 | 1 | 1 | 98.800.000 | 1 | 99.905.000 | 1 | 101.415.000 | 1 | 103.500.000 | 1 | 105.935.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 7.200.000 | | 7.280.000 | | 7.390.000 | | 7.545.000 | | 7.725.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 465 | 443 | 299 | 7.200.000 | 264 | 7.280.000 | 237 | 7.390.000 | 217 | 7.545.000 | 202 | 7.725.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 589 | 519 | 542 | 2.000.000 | 550 | 2.025.000 | 553 | 2.060.000 | 556 | 2.105.000 | 559 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 80.000.000 | | 80.890.000 | | 82.100.000 | | 83.775.000 | | 85.740.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.890.000 | 12 | 82.100.000 | 12 | 83.775.000 | 12 | 85.740.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 7.400.000 | | 7.485.000 | | 7.600.000 | | 7.760.000 | | 7.945.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 35 | 7.400.000 | 31 | 7.485.000 | 28 | 7.600.000 | 25 | 7.760.000 | 24 | 7.945.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.800.000 | | 1.820.000 | | 1.850.000 | | 1.890.000 | | 1.935.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 31 | 1.800.000 | 34 | 1.820.000 | 41 | 1.850.000 | 48 | 1.890.000 | 55 | 1.935.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 400.000 | | 405.000 | | 415.000 | | 425.000 | | 435.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 400.000 | 8 | 405.000 | 8 | 415.000 | 8 | 425.000 | 8 | 435.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 86,90 | 95 | 95 | 26.628.500 | 95 | 26.930.000 | 95 | 27.330.000 | 95 | 27.890.000 | 95 | 28.545.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 17.828.500 | | 18.030.000 | | 18.300.000 | | 18.675.000 | | 19.115.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 17.828.500 | 12 | 18.030.000 | 12 | 18.300.000 | 12 | 18.675.000 | 12 | 19.115.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 8.800.000 | | 8.900.000 | | 9.030.000 | | 9.215.000 | | 9.430.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 8.800.000 | 12 | 8.900.000 | 12 | 9.030.000 | 12 | 9.215.000 | 12 | 9.430.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 6277 | 6302 | 6327 | 18.800.000 | 6352 | 19.010.000 | 6377 | 19.295.000 | 6402 | 19.690.000 | 6427 | 20.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 18.800.000 | | 19.010.000 | | 19.295.000 | | 19.690.000 | | 20.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 18.800.000 | 12 | 19.010.000 | 12 | 19.295.000 | 12 | 19.690.000 | 12 | 20.155.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 40.640.000 | 30 | 41.105.000 | 35 | 41.730.000 | 40 | 42.595.000 | 45 | 43.600.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 113,73 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 40.640.000 | | 41.105.000 | | 41.730.000 | | 42.595.000 | | 43.600.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 51 | 100 | 100 | 40.640.000 | 100 | 41.105.000 | 100 | 41.730.000 | 100 | 42.595.000 | 100 | 43.600.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 24,53 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 14.240.000 | | 14.400.000 | | 14.615.000 | | 14.915.000 | | 15.265.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.794 | 15.017 | 24.088 | 14.240.000 | 24.069 | 14.400.000 | 24.050 | 14.615.000 | 24.031 | 14.915.000 | 24.012 | 15.265.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 5.600.000 | | 5.665.000 | | 5.750.000 | | 5.870.000 | | 6.010.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.893 | 4.944 | 5.063 | 5.600.000 | 5.139 | 5.665.000 | 5.216 | 5.750.000 | 5.294 | 5.870.000 | 5.373 | 6.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.331 | 1.269 | 1.269 | 2.000.000 | 1.270 | 2.025.000 | 1.270 | 2.060.000 | 1.270 | 2.105.000 | 1.270 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 427 | 162 | 162 | 2.000.000 | 162 | 2.025.000 | 162 | 2.060.000 | 163 | 2.105.000 | 163 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 16.800.000 | | 16.990.000 | | 17.245.000 | | 17.600.000 | | 18.015.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 90 | 89 | 90 | 16.800.000 | 92 | 16.990.000 | 94 | 17.245.000 | 96 | 17.600.000 | 98 | 18.015.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 10.332.000 | | 16.950.000 | | 17.210.000 | | 17.570.000 | | 17.990.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 10.332.000 | 85 | 16.950.000 | 90 | 17.210.000 | 95 | 17.570.000 | 100 | 17.990.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 10.332.000 | | 10.450.000 | | 10.610.000 | | 10.830.000 | | 11.085.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 3 | 12 | 15 | 10.332.000 | 18 | 10.450.000 | 21 | 10.610.000 | 24 | 10.830.000 | 27 | 11.085.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 10.332.000 | | 10.450.000 | | 10.610.000 | | 10.830.000 | | 11.085.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 10.332.000 | 4 | 10.450.000 | 4 | 10.610.000 | 4 | 10.830.000 | 4 | 11.085.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0011 - Puskesmas Ranugedang** | | | | | **3.705.373.920** | | **3.753.055.000** | | **3.809.035.000** | | **3.886.795.000** | | **3.977.800.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.288.608.110,00 | | 3.325.115.000,00 | | 3.374.660.000,00 | | 3.443.505.000,00 | | 3.524.085.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 95,5 | 95 | 95 | 3.288.608.110 | 95 | 3.325.115.000 | 95 | 3.374.660.000 | 95 | 3.443.505.000 | 95 | 3.524.085.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 3.288.608.110 | | 3.325.115.000 | | 3.374.660.000 | | 3.443.505.000 | | 3.524.085.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 3.288.608.110 | 4 | 3.325.115.000 | 4 | 3.374.660.000 | 4 | 3.443.505.000 | 5 | 3.524.085.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 3.288.608.110 | | 3.325.115.000 | | 3.374.660.000 | | 3.443.505.000 | | 3.524.085.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 3.288.608.110 | 1 | 3.325.115.000 | 1 | 3.374.660.000 | 1 | 3.443.505.000 | | 3.524.085.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 396.018.450 | | 400.460.000 | | 406.480.000 | | 414.820.000 | | 424.570.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 54.139.450 | 100 | 54.745.000 | 100 | 55.565.000 | 100 | 56.700.000 | 100 | 58.030.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 54.139.450 | | 54.745.000 | | 55.565.000 | | 56.700.000 | | 58.030.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 95,47 | 95,5 | 96,2 | 54.139.450 | 96,9 | 54.745.000 | 97,6 | 55.565.000 | 98,3 | 56.700.000 | 99 | 58.030.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 54.139.450 | | 54.745.000 | | 55.565.000 | | 56.700.000 | | 58.030.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 54.139.450 | 4 | 54.745.000 | 4 | 55.565.000 | 4 | 56.700.000 | 4 | 58.030.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 3,73 | 3,53 | 3,33 | 185.195.800 | 3,14 | 187.270.000 | 2,94 | 190.075.000 | 2,75 | 193.970.000 | 2,35 | 198.520.000 | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 4,93 | 4,44 | 3,99 | | 3,99 | | 3,23 | | 2,91 | | 2,02 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 11 | 10 | 10 | | 9 | | 9 | | 8 | | 7 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 185.195.800 | | 187.270.000 | | 190.075.000 | | 193.970.000 | | 198.520.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 86,26 | 87,76 | 89,26 | 74.795.800 | 90,76 | 75.630.000 | 90,81 | 76.760.000 | 90,86 | 78.330.000 | 90,91 | 80.165.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 74.795.800 | | 75.630.000 | | 76.760.000 | | 78.330.000 | | 80.165.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 74.795.800 | 12 | 75.630.000 | 12 | 76.760.000 | 12 | 78.330.000 | 12 | 80.165.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 73,92 | 75,92 | 77,92 | 110.400.000 | 79,92 | 111.640.000 | 81,92 | 113.315.000 | 83,92 | 115.640.000 | 85,92 | 118.355.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 88,08 | 88,58 | 89,08 | | 89,58 | | 90,08 | | 90,58 | | 91,08 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 56.000.000 | | 56.625.000 | | 57.470.000 | | 58.645.000 | | 60.020.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 438 | 477 | 458 | 56.000.000 | 455 | 56.625.000 | 452 | 57.470.000 | 449 | 58.645.000 | 446 | 60.020.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 800.000 | | 810.000 | | 825.000 | | 845.000 | | 865.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 458 | 491 | 458 | 800.000 | 455 | 810.000 | 452 | 825.000 | 449 | 845.000 | 446 | 865.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 800.000 | | 810.000 | | 825.000 | | 845.000 | | 865.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 458 | 459 | 458 | 800.000 | 455 | 810.000 | 452 | 825.000 | 449 | 845.000 | 446 | 865.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 2.800.000 | | 2.835.000 | | 2.880.000 | | 2.940.000 | | 3.010.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.136 | 1.888 | 2.508 | 2.800.000 | 2.493 | 2.835.000 | 2.478 | 2.880.000 | 2.463 | 2.940.000 | 2.448 | 3.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 43.400.000 | | 43.885.000 | | 44.540.000 | | 45.450.000 | | 46.515.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.145 | 4.310 | 4.638 | 43.400.000 | 4.653 | 43.885.000 | 4.668 | 44.540.000 | 4.683 | 45.450.000 | 4.698 | 46.515.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 6.600.000 | | 6.675.000 | | 6.775.000 | | 6.915.000 | | 7.080.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 6.600.000 | 4 | 6.675.000 | 4 | 6.775.000 | 4 | 6.915.000 | 4 | 7.080.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 165 | 95,00 | 96,00 | 145003200,00 | 97,00 | 146630000,00 | 98,00 | 148835000,00 | 99,00 | 151890000,00 | 100,00 | 155.460.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,030 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0,03 | 0,02 | 0,01 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 83,3 | 95,00 | 95,00 | | 95,00 | | 95,00 | | 95,00 | | 95,00 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 57,1 | 62,58 | 68,07 | | 73,55 | | 79,03 | | 84,52 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10,00 | 15,00 | | 30,00 | | 50,00 | | 70,00 | | 80,00 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 145.003.200 | | 146.630.000 | | 148.835.000 | | 151.890.000 | | 155.460.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,19 | 1 | 1 | 101.603.200 | 1 | 102.745.000 | 1 | 104.295.000 | 1 | 106.435.000 | 1 | 108.940.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 83,3 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 3.100.000 | | 3.135.000 | | 3.185.000 | | 3.250.000 | | 3.330.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 423 | 438 | 295 | 3.100.000 | 261 | 3.135.000 | 235 | 3.185.000 | 214 | 3.250.000 | 199 | 3.330.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 1.100.000 | | 1.115.000 | | 1.135.000 | | 1.160.000 | | 1.190.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 508 | 507 | 529 | 1.100.000 | 537 | 1.115.000 | 540 | 1.135.000 | 543 | 1.160.000 | 546 | 1.190.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 92.803.200 | | 93.835.000 | | 95.235.000 | | 97.180.000 | | 99.455.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 92.803.200 | 12 | 93.835.000 | 12 | 95.235.000 | 12 | 97.180.000 | 12 | 99.455.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 2.700.000 | | 2.730.000 | | 2.775.000 | | 2.835.000 | | 2.905.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 39 | 2.700.000 | 34 | 2.730.000 | 31 | 2.775.000 | 28 | 2.835.000 | 26 | 2.905.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 500.000 | | 510.000 | | 520.000 | | 535.000 | | 550.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 17 | 500.000 | 19 | 510.000 | 22 | 520.000 | 26 | 535.000 | 30 | 550.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.400.000 | | 1.420.000 | | 1.445.000 | | 1.475.000 | | 1.510.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.400.000 | 8 | 1.420.000 | 8 | 1.445.000 | 8 | 1.475.000 | 8 | 1.510.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 91,25 | 95 | 95 | 32.800.000 | 95 | 33.165.000 | 95 | 33.660.000 | 95 | 34.350.000 | 95 | 35.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 22.800.000 | | 23.055.000 | | 23.400.000 | | 23.880.000 | | 24.440.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 22.800.000 | 12 | 23.055.000 | 12 | 23.400.000 | 12 | 23.880.000 | 12 | 24.440.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 10.000.000 | | 10.110.000 | | 10.260.000 | | 10.470.000 | | 10.715.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.110.000 | 12 | 10.260.000 | 12 | 10.470.000 | 12 | 10.715.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 4.695 | 4.715 | 4.735 | 10.600.000 | 4.755 | 10.720.000 | 4.775 | 10.880.000 | 4.795 | 11.105.000 | 4.815 | 11.365.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 10.600.000 | | 10.720.000 | | 10.880.000 | | 11.105.000 | | 11.365.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 10.600.000 | 12 | 10.720.000 | 12 | 10.880.000 | 12 | 11.105.000 | 12 | 11.365.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 11.680.000 | 30 | 11.815.000 | 35 | 12.005.000 | 40 | 12.260.000 | 45 | 12.560.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 68,84 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 11.680.000 | | 11.815.000 | | 12.005.000 | | 12.260.000 | | 12.560.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 93 | 100 | 100 | 11.680.000 | 100 | 11.815.000 | 100 | 12.005.000 | 100 | 12.260.000 | 100 | 12.560.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 37,04 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 1.780.000 | | 1.800.000 | | 1.830.000 | | 1.870.000 | | 1.915.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 14.816 | 13.616 | 21.604 | 1.780.000 | 21.587 | 1.800.000 | 21.570 | 1.830.000 | 21.553 | 1.870.000 | 21.536 | 1.915.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 4.900.000 | | 4.955.000 | | 5.030.000 | | 5.135.000 | | 5.260.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.639 | 4.618 | 5.355 | 4.900.000 | 5.435 | 4.955.000 | 5.517 | 5.030.000 | 5.600 | 5.135.000 | 5.684 | 5.260.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 700.000 | | 710.000 | | 725.000 | | 740.000 | | 760.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.266 | 1.191 | 1.191 | 700.000 | 1.192 | 710.000 | 1.192 | 725.000 | 1.192 | 740.000 | 1.192 | 760.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 700.000 | | 710.000 | | 725.000 | | 740.000 | | 760.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 693 | 278 | 278 | 700.000 | 279 | 710.000 | 279 | 725.000 | 279 | 740.000 | 279 | 760.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 3.600.000 | | 3.640.000 | | 3.695.000 | | 3.775.000 | | 3.865.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 44 | 37 | 45 | 3.600.000 | 46 | 3.640.000 | 47 | 3.695.000 | 48 | 3.775.000 | 49 | 3.865.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN | | | | | 20.747.360 | | 27.480.000 | | 27.895.000 | | 28.470.000 | | 29.145.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 79,3 | 75 | 80 | 20.747.360 | 85 | 27.480.000 | 90 | 27.895.000 | 95 | 28.470.000 | 100 | 29.145.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya | | | | | 20.747.360 | | 20.980.000 | | 21.295.000 | | 21.730.000 | | 22.240.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 3 | 12 | 15 | 20.747.360 | 18 | 20.980.000 | 21 | 21.295.000 | 24 | 21.730.000 | 27 | 22.240.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 20.747.360 | | 20.980.000 | | 21.295.000 | | 21.730.000 | | 22.240.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 20.747.360 | 4 | 20.980.000 | 4 | 21.295.000 | 4 | 21.730.000 | 4 | 22.240.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0012 - Puskesmas Krucil** | | | | | **7.507.316.750** | | **7.601.205.000** | | **7.714.515.000** | | **7.871.940.000** | | **8.056.205.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 6.608.227.750,00 | | 6.681.580.000,00 | | 6.781.140.000,00 | | 6.919.480.000,00 | | 7.081.400.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 93,86 | 94 | 94 | 6.608.227.750 | 94 | 6.681.580.000 | 94 | 6.781.140.000 | 94 | 6.919.480.000 | 94 | 7.081.400.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 6.608.227.750 | | 6.681.580.000 | | 6.781.140.000 | | 6.919.480.000 | | 7.081.400.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 6.608.227.750 | 4 | 6.681.580.000 | 4 | 6.781.140.000 | 4 | 6.919.480.000 | 5 | 7.081.400.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 6.608.227.750 | | 6.681.580.000 | | 6.781.140.000 | | 6.919.480.000 | | 7.081.400.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 6.608.227.750 | 1 | 6.681.580.000 | 1 | 6.781.140.000 | 1 | 6.919.480.000 | 1 | 7.081.400.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN | | | | | 896.289.000 | | 910.290.000 | | 923.895.000 | | 942.780.000 | | 964.890.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 123.201.000 | 100 | 124.570.000 | 100 | 126.430.000 | 100 | 129.010.000 | 100 | 132.030.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 123.201.000 | | 124.570.000 | | 126.430.000 | | 129.010.000 | | 132.030.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 98,43 | 98,5 | 98,6 | 123.201.000 | 98,7 | 124.570.000 | 98,8 | 126.430.000 | 98,9 | 129.010.000 | 99 | 132.030.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 123.201.000 | | 124.570.000 | | 126.430.000 | | 129.010.000 | | 132.030.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 123.201.000 | 4 | 124.570.000 | 4 | 126.430.000 | 4 | 129.010.000 | 4 | 132.030.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 6,76 | 6,08 | 5,48 | 596.668.000 | 4,93 | 607.310.000 | 4,44 | 616.370.000 | 3,99 | 628.955.000 | 3,59 | 643.690.000 | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 16 | 16 | 14 | | 14 | | 14 | | 13 | | 13 | | |
| | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | | 0,8 | | 0,75 | | 0,7 | | 0,7 | | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 4,59 | 4,49 | 4,38 | | 4,27 | | 3,95 | | 3,74 | | 3,53 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 596.668.000 | | 607.310.000 | | 616.370.000 | | 628.955.000 | | 643.690.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 86,32 | 87,82 | 89,32 | 272.468.000 | 90,82 | 275.495.000 | 90,87 | 279.600.000 | 90,92 | 285.305.000 | 90,97 | 291.985.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 272.468.000 | | 275.495.000 | | 279.600.000 | | 285.305.000 | | 291.985.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 272.468.000 | 12 | 275.495.000 | 12 | 279.600.000 | 12 | 285.305.000 | 12 | 291.985.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 72,36 | 74,36 | 76,36 | 324.200.000 | 78,36 | 331.815.000 | 80,36 | 336.770.000 | 82,36 | 343.650.000 | 84,36 | 351.705.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 90,11 | 90,11 | 90,11 | | 90,11 | | 90,11 | | 90,11 | | 90,11 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 196.000.000 | | 198.180.000 | | 201.135.000 | | 205.240.000 | | 210.045.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 745 | 767 | 846 | 196.000.000 | 840 | 198.180.000 | 834 | 201.135.000 | 828 | 205.240.000 | 822 | 210.045.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 2.800.000 | | 2.835.000 | | 2.880.000 | | 2.940.000 | | 3.010.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 846 | 878 | 846 | 2.800.000 | 840 | 2.835.000 | 834 | 2.880.000 | 828 | 2.940.000 | 822 | 3.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.800.000 | | 2.835.000 | | 2.880.000 | | 2.940.000 | | 3.010.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 829 | 855 | 829 | 2.800.000 | 823 | 2.835.000 | 817 | 2.880.000 | 811 | 2.940.000 | 805 | 3.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 2.800.000 | | 2.835.000 | | 2.880.000 | | 2.940.000 | | 3.010.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.430 | 3.278 | 3.430 | 2.800.000 | 3.409 | 2.835.000 | 3.389 | 2.880.000 | 3.369 | 2.940.000 | 3.349 | 3.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 119.800.000 | | 121.130.000 | | 122.935.000 | | 125.445.000 | | 128.385.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7.801 | 7.593 | 8.561 | 119.800.000 | 8.589 | 121.130.000 | 8.617 | 122.935.000 | 8.645 | 125.445.000 | 8.674 | 128.385.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 142 | 95 | 96 | 149.520.000 | 97 | 151.200.000 | 98 | 153.470.000 | 99 | 156.620.000 | 100 | 160.305.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 14,3 | 26,92 | 39,53 | | 52,15 | | 64,77 | | 77,38 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 40 | 50 | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 149.520.000 | | 151.200.000 | | 153.470.000 | | 156.620.000 | | 160.305.000 | |
| | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 0,83 | 1 | 1 | 119.400.000 | 1 | 120.740.000 | 1 | 122.555.000 | 1 | 125.070.000 | 1 | 128.010.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 7.800.000 | | 7.890.000 | | 8.010.000 | | 8.175.000 | | 8.370.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 722 | 685 | 462 | 7.800.000 | 408 | 7.890.000 | 367 | 8.010.000 | 335 | 8.175.000 | 312 | 8.370.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 2.800.000 | | 2.835.000 | | 2.880.000 | | 2.940.000 | | 3.010.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 959 | 848 | 885 | 2.800.000 | 898 | 2.835.000 | 903 | 2.880.000 | 908 | 2.940.000 | 913 | 3.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 90.000.000 | | 91.000.000 | | 92.360.000 | | 94.245.000 | | 96.450.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 4 | 12 | 90.000.000 | 12 | 91.000.000 | 12 | 92.360.000 | 12 | 94.245.000 | 12 | 96.450.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 8.000.000 | | 8.090.000 | | 8.215.000 | | 8.385.000 | | 8.585.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 47 | 8.000.000 | 41 | 8.090.000 | 37 | 8.215.000 | 34 | 8.385.000 | 32 | 8.585.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 9.600.000 | | 9.710.000 | | 9.855.000 | | 10.060.000 | | 10.300.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 17 | 9.600.000 | 19 | 9.710.000 | 22 | 9.855.000 | 26 | 10.060.000 | 30 | 10.300.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.200.000 | 8 | 1.215.000 | 8 | 1.235.000 | 8 | 1.265.000 | 8 | 1.295.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 90,62 | 95 | 95 | 11.320.000 | 95 | 11.450.000 | 95 | 11.620.000 | 95 | 11.860.000 | 95 | 12.140.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 2.800.000 | | 2.835.000 | | 2.880.000 | | 2.940.000 | | 3.010.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 2.800.000 | 12 | 2.835.000 | 12 | 2.880.000 | 12 | 2.940.000 | 12 | 3.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 8.520.000 | | 8.615.000 | | 8.740.000 | | 8.920.000 | | 9.130.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 8.520.000 | 12 | 8.615.000 | 12 | 8.740.000 | 12 | 8.920.000 | 12 | 9.130.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 11.620 | 11.660 | 11.700 | 18.800.000 | 11.740 | 19.010.000 | 11.780 | 19.295.000 | 11.820 | 19.690.000 | 11.860 | 20.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 18.800.000 | | 19.010.000 | | 19.295.000 | | 19.690.000 | | 20.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 4 | 12 | 18.800.000 | 12 | 19.010.000 | 12 | 19.295.000 | 12 | 19.690.000 | 12 | 20.155.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 26.900.000 | 30 | 27.210.000 | 35 | 27.625.000 | 40 | 28.195.000 | 45 | 28.865.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 50,20 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 26.900.000 | | 27.210.000 | | 27.625.000 | | 28.195.000 | | 28.865.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 62 | 100 | 100 | 26.900.000 | 100 | 27.210.000 | 100 | 27.625.000 | 100 | 28.195.000 | 100 | 28.865.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 23,24 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 4.500.000 | | 4.550.000 | | 4.620.000 | | 4.715.000 | | 4.830.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 22.324 | 15.451 | 37.883 | 4.500.000 | 37.853 | 4.550.000 | 37.823 | 4.620.000 | 37.793 | 4.715.000 | 37.763 | 4.830.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 11.200.000 | | 11.325.000 | | 11.495.000 | | 11.730.000 | | 12.005.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 8.019 | 7.940 | 8.139 | 11.200.000 | 8.261 | 11.325.000 | 8.385 | 11.495.000 | 8.511 | 11.730.000 | 8.639 | 12.005.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 2.800.000 | | 2.835.000 | | 2.880.000 | | 2.940.000 | | 3.010.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.608 | 2.175 | 2.175 | 2.800.000 | 2.176 | 2.835.000 | 2.176 | 2.880.000 | 2.177 | 2.940.000 | 2.177 | 3.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.800.000 | | 2.835.000 | | 2.880.000 | | 2.940.000 | | 3.010.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.044 | 986 | 987 | 2.800.000 | 988 | 2.835.000 | 989 | 2.880.000 | 990 | 2.940.000 | 991 | 3.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 5.600.000 | | 5.665.000 | | 5.750.000 | | 5.870.000 | | 6.010.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 63 | 0 | 63 | 5.600.000 | 64 | 5.665.000 | 65 | 5.750.000 | 67 | 5.870.000 | 69 | 6.010.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 2.800.000 | | 9.335.000 | | 9.480.000 | | 9.680.000 | | 9.915.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 2.800.000 | 85 | 9.335.000 | 90 | 9.480.000 | 95 | 9.680.000 | 100 | 9.915.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 2.800.000 | | 2.835.000 | | 2.880.000 | | 2.940.000 | | 3.010.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 3 | 12 | 15 | 2.800.000 | 18 | 2.835.000 | 21 | 2.880.000 | 24 | 2.940.000 | 27 | 3.010.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 2.800.000 | | 2.835.000 | | 2.880.000 | | 2.940.000 | | 3.010.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan | 3 | 4 | 4 | 2.800.000 | 4 | 2.835.000 | 4 | 2.880.000 | 4 | 2.940.000 | 4 | 3.010.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0013 - Puskesmas Wangkal** | | | | | **4.808.613.066** | | **4.868.550.000** | | **4.941.175.000** | | **5.042.045.000** | | **5.160.075.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.107.216.996,00 | | 4.152.810.000,00 | | 4.214.690.000,00 | | 4.300.670.000,00 | | 4.401.310.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 89,87 | 90 | 90 | 4.107.216.996 | 90 | 4.152.810.000 | 90 | 4.214.690.000 | 90 | 4.300.670.000 | 91 | 4.401.310.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 4.107.216.996 | | 4.152.810.000 | | 4.214.690.000 | | 4.300.670.000 | | 4.401.310.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 4.107.216.996 | 4 | 4.152.810.000 | 4 | 4.214.690.000 | 4 | 4.300.670.000 | 5 | 4.401.310.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 4.107.216.996 | | 4.152.810.000 | | 4.214.690.000 | | 4.300.670.000 | | 4.401.310.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 4.107.216.996 | 1 | 4.152.810.000 | 1 | 4.214.690.000 | 1 | 4.300.670.000 | 1 | 4.401.310.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 684.120.070 | | 691.770.000 | | 702.150.000 | | 716.535.000 | | 733.335.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 77.331.270 | 100 | 78.190.000 | 100 | 79.360.000 | 100 | 80.980.000 | 100 | 82.875.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 77.331.270 | | 78.190.000 | | 79.360.000 | | 80.980.000 | | 82.875.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 82,25 | 85 | 87,8 | 77.331.270 | 90,6 | 78.190.000 | 93,4 | 79.360.000 | 96,2 | 80.980.000 | 99 | 82.875.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 77.331.270 | | 78.190.000 | | 79.360.000 | | 80.980.000 | | 82.875.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 77.331.270 | 4 | 78.190.000 | 4 | 79.360.000 | 4 | 80.980.000 | 4 | 82.875.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | 413.216.800 | 0 | 417.820.000 | 0 | 424.060.000 | 0 | 432.730.000 | 0 | 442.870.000 | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 10,06 | 9,85 | 9,64 | | 9,42 | | 8,78 | | 8,35 | | 7,49 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 7,3896 | 6,65 | 5,99 | | 5,39 | | 4,85 | | 4,36 | | 3,93 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 413.216.800 | | 417.820.000 | | 424.060.000 | | 432.730.000 | | 442.870.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 98,73 | 98,73 | 98,73 | 135.312.000 | 98,73 | 136.815.000 | 98,73 | 138.855.000 | 98,73 | 141.690.000 | 98,73 | 145.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 135.312.000 | | 136.815.000 | | 138.855.000 | | 141.690.000 | | 145.010.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 135.312.000 | 12 | 136.815.000 | 12 | 138.855.000 | 12 | 141.690.000 | 12 | 145.010.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 75 | 77 | 79 | 277.904.800 | 81 | 281.005.000 | 83 | 285.205.000 | 85 | 291.040.000 | 87 | 297.860.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 85,08 | 85,86 | 86,64 | | 87,42 | | 88,2 | | 88,98 | | 89 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 192.604.800 | | 194.745.000 | | 197.650.000 | | 201.685.000 | | 206.405.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 402 | 427 | 429 | 192.604.800 | 426 | 194.745.000 | 423 | 197.650.000 | 420 | 201.685.000 | 417 | 206.405.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 800.000 | | 810.000 | | 825.000 | | 845.000 | | 865.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 429 | 497 | 429 | 800.000 | 426 | 810.000 | 423 | 825.000 | 420 | 845.000 | 417 | 865.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 429 | 469 | 429 | 1.000.000 | 426 | 1.015.000 | 423 | 1.035.000 | 420 | 1.060.000 | 417 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.300.000 | | 1.315.000 | | 1.335.000 | | 1.365.000 | | 1.400.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.834 | 1.823 | 1.834 | 1.300.000 | 1.823 | 1.315.000 | 1.812 | 1.335.000 | 1.801 | 1.365.000 | 1.790 | 1.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 72.600.000 | | 73.410.000 | | 74.505.000 | | 76.025.000 | | 77.805.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.950 | 3.805 | 4.568 | 72.600.000 | 4.583 | 73.410.000 | 4.598 | 74.505.000 | 4.613 | 76.025.000 | 4.628 | 77.805.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 9.600.000 | | 9.710.000 | | 9.855.000 | | 10.060.000 | | 10.300.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 9.600.000 | 4 | 9.710.000 | 4 | 9.855.000 | 4 | 10.060.000 | 4 | 10.300.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 158 | 95 | 96 | 163.972.000 | 97 | 165.815.000 | 98 | 168.320.000 | 99 | 171.780.000 | 100 | 175.810.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,057 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 50 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 30,80 | 40,67 | 50,53 | | 60,40 | | 70,27 | | 80,13 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 163.972.000 | | 165.815.000 | | 168.320.000 | | 171.780.000 | | 175.810.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,09 | 1 | 1 | 123.056.000 | 1 | 124.440.000 | 1 | 126.320.000 | 1 | 128.915.000 | 1 | 131.935.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 50 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 14.400.000 | | 14.560.000 | | 14.780.000 | | 15.085.000 | | 15.440.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 445 | 428 | 289 | 14.400.000 | 255 | 14.560.000 | 229 | 14.780.000 | 210 | 15.085.000 | 195 | 15.440.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 621 | 591 | 617 | 1.000.000 | 626 | 1.015.000 | 630 | 1.035.000 | 633 | 1.060.000 | 636 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 104.656.000 | | 105.820.000 | | 107.400.000 | | 109.590.000 | | 112.155.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 104.656.000 | 12 | 105.820.000 | 12 | 107.400.000 | 12 | 109.590.000 | 12 | 112.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 85 | 1.000.000 | 73 | 1.015.000 | 65 | 1.035.000 | 58 | 1.060.000 | 53 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 27 | 1.000.000 | 30 | 1.015.000 | 35 | 1.035.000 | 41 | 1.060.000 | 47 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.000.000 | 8 | 1.015.000 | 8 | 1.035.000 | 8 | 1.060.000 | 8 | 1.085.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 89,23 | 95 | 95 | 27.516.000 | 95 | 27.825.000 | 95 | 28.245.000 | 95 | 28.825.000 | 95 | 29.505.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 15.016.000 | | 15.185.000 | | 15.415.000 | | 15.730.000 | | 16.100.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 15.016.000 | 12 | 15.185.000 | 12 | 15.415.000 | 12 | 15.730.000 | 12 | 16.100.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 12.500.000 | | 12.640.000 | | 12.830.000 | | 13.095.000 | | 13.405.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 12.500.000 | 12 | 12.640.000 | 12 | 12.830.000 | 12 | 13.095.000 | 12 | 13.405.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 2.880 | 2.910 | 2.940 | 13.400.000 | 2.970 | 13.550.000 | 3.000 | 13.755.000 | 3.030 | 14.040.000 | 3.060 | 14.370.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 13.400.000 | | 13.550.000 | | 13.755.000 | | 14.040.000 | | 14.370.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 13.400.000 | 12 | 13.550.000 | 12 | 13.755.000 | 12 | 14.040.000 | 12 | 14.370.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 29.600.000 | 30 | 29.945.000 | 35 | 30.410.000 | 40 | 31.045.000 | 45 | 31.780.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 63,21 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 29.600.000 | | 29.945.000 | | 30.410.000 | | 31.045.000 | | 31.780.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 83 | 100 | 100 | 29.600.000 | 100 | 29.945.000 | 100 | 30.410.000 | 100 | 31.045.000 | 100 | 31.780.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 55,39 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 10.541 | 14.111 | 22.281 | 1.000.000 | 22.263 | 1.015.000 | 22.245 | 1.035.000 | 22.227 | 1.060.000 | 22.209 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 7.800.000 | | 7.890.000 | | 8.010.000 | | 8.175.000 | | 8.370.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.981 | 5.350 | 5.275 | 7.800.000 | 5.354 | 7.890.000 | 5.434 | 8.010.000 | 5.516 | 8.175.000 | 5.599 | 8.370.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.105 | 1.432 | 1.432 | 1.000.000 | 1.433 | 1.015.000 | 1.433 | 1.035.000 | 1.433 | 1.060.000 | 1.434 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 631 | 685 | 686 | 1.000.000 | 686 | 1.015.000 | 687 | 1.035.000 | 688 | 1.060.000 | 688 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 18.800.000 | | 19.010.000 | | 19.295.000 | | 19.690.000 | | 20.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 44 | 44 | 53 | 18.800.000 | 54 | 19.010.000 | 55 | 19.295.000 | 56 | 19.690.000 | 57 | 20.155.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 17.276.000 | | 23.970.000 | | 24.335.000 | | 24.840.000 | | 25.430.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 17.276.000 | 85 | 23.970.000 | 90 | 24.335.000 | 95 | 24.840.000 | 100 | 25.430.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 17.276.000 | | 17.470.000 | | 17.735.000 | | 18.100.000 | | 18.525.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 3 | 12 | 15 | 17.276.000 | 18 | 17.470.000 | 21 | 17.735.000 | 24 | 18.100.000 | 27 | 18.525.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 17.276.000 | | 17.470.000 | | 17.735.000 | | 18.100.000 | | 18.525.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 17.276.000 | 4 | 17.470.000 | 4 | 17.735.000 | 4 | 18.100.000 | 4 | 18.525.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0014 - Puskesmas Condong** | | | | | **3.175.233.030** | | **3.217.035.000** | | **3.265.035.000** | | **3.331.720.000** | | **3.409.730.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.729.314.030,00 | | 2.759.610.000,00 | | 2.800.730.000,00 | | 2.857.865.000,00 | | 2.924.740.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 92,25 | 92 | 92 | 2.729.314.030 | 93 | 2.759.610.000 | 93 | 2.800.730.000 | 94 | 2.857.865.000 | 94 | 2.924.740.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.729.314.030 | | 2.759.610.000 | | 2.800.730.000 | | 2.857.865.000 | | 2.924.740.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 2.729.314.030 | 4 | 2.759.610.000 | 4 | 2.800.730.000 | 4 | 2.857.865.000 | 5 | 2.924.740.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.729.314.030 | | 2.759.610.000 | | 2.800.730.000 | | 2.857.865.000 | | 2.924.740.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.729.314.030 | 1 | 2.759.610.000 | 1 | 2.800.730.000 | 1 | 2.857.865.000 | 1 | 2.924.740.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 431.825.000 | | 436.670.000 | | 443.235.000 | | 452.345.000 | | 462.965.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 86.600.000 | 100 | 87.565.000 | 100 | 88.870.000 | 100 | 90.685.000 | 100 | 92.810.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 86.600.000 | | 87.565.000 | | 88.870.000 | | 90.685.000 | | 92.810.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 94,85 | 94,9 | 95,72 | 86.600.000 | 86,54 | 87.565.000 | 97,36 | 88.870.000 | 98,18 | 90.685.000 | 99 | 92.810.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 86.600.000 | | 87.565.000 | | 88.870.000 | | 90.685.000 | | 92.810.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 86.600.000 | 4 | 87.565.000 | 4 | 88.870.000 | 4 | 90.685.000 | 4 | 92.810.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | 206.665.000 | 0 | 208.980.000 | 0 | 212.115.000 | 0 | 216.465.000 | 0 | 221.540.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 13,14 | 12,77 | 12,41 | | 12,04 | | 11,31 | | 10,58 | | 9,85 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 7,29 | 6,56 | 5,9 | | 5,9 | | 4,78 | | 4,3 | | 3,87 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 206.665.000 | | 208.980.000 | | 212.115.000 | | 216.465.000 | | 221.540.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 92,68 | 93,18 | 93,68 | 113.965.000 | 94,18 | 115.235.000 | 95,68 | 116.955.000 | 96,18 | 119.345.000 | 96,68 | 122.140.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 113.965.000 | | 115.235.000 | | 116.955.000 | | 119.345.000 | | 122.140.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 113.965.000 | 12 | 115.235.000 | 12 | 116.955.000 | 12 | 119.345.000 | 12 | 122.140.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 60,33 | 63,33 | 66,33 | 92.700.000 | 69,33 | 93.745.000 | 72,33 | 95.160.000 | 75,33 | 97.120.000 | 78,33 | 99.400.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 91,67 | 91,67 | 91,67 | | 91,67 | | 91,67 | | 91,67 | | 91,67 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 48.000.000 | | 48.535.000 | | 49.260.000 | | 50.265.000 | | 51.445.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 221 | 295 | 233 | 48.000.000 | 231 | 48.535.000 | 229 | 49.260.000 | 227 | 50.265.000 | 225 | 51.445.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 233 | 270 | 233 | 1.200.000 | 231 | 1.215.000 | 229 | 1.235.000 | 227 | 1.265.000 | 225 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 264 | 274 | 264 | 2.000.000 | 262 | 2.025.000 | 260 | 2.060.000 | 258 | 2.105.000 | 256 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.063 | 1.087 | 1.063 | 1.200.000 | 1.057 | 1.215.000 | 1.051 | 1.235.000 | 1.045 | 1.265.000 | 1.039 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 37.500.000 | | 37.920.000 | | 38.490.000 | | 39.280.000 | | 40.200.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.970 | 1.234 | 2.970 | 37.500.000 | 2.980 | 37.920.000 | 2.990 | 38.490.000 | 3.000 | 39.280.000 | 3.010 | 40.200.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 2.800.000 | | 2.835.000 | | 2.880.000 | | 2.940.000 | | 3.010.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 2.800.000 | 4 | 2.835.000 | 4 | 2.880.000 | 4 | 2.940.000 | 4 | 3.010.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 146 | 95 | 96 | 124.460.000 | 97 | 125.855.000 | 98 | 127.750.000 | 99 | 130.385.000 | 100 | 133.450.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,702 | 0,600 | 0,400 | | 0,200 | | 0,180 | | 0,160 | | 0,120 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0,05 | 0,04 | 0,03 | | 0,02 | | 0,01 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 16,70 | 28,92 | 41,13 | | 53,35 | | 65,57 | | 77,78 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 16,67 | 20 | 25 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | | | | | 124.460.000 | | 125.855.000 | | 127.750.000 | | 130.385.000 | | 133.450.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,40 | 1 | 1 | 87.760.000 | 1 | 88.745.000 | 1 | 90.080.000 | 1 | 91.940.000 | 1 | 94.100.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | 93 | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 6.500.000 | | 6.575.000 | | 6.675.000 | | 6.815.000 | | 6.975.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 252 | 251 | 169 | 6.500.000 | 150 | 6.575.000 | 135 | 6.675.000 | 123 | 6.815.000 | 114 | 6.975.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 2.500.000 | | 2.530.000 | | 2.570.000 | | 2.625.000 | | 2.690.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 314 | 349 | 364 | 2.500.000 | 370 | 2.530.000 | 372 | 2.570.000 | 374 | 2.625.000 | 376 | 2.690.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 75.160.000 | | 75.995.000 | | 77.130.000 | | 78.705.000 | | 80.550.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 75.160.000 | 12 | 75.995.000 | 12 | 77.130.000 | 12 | 78.705.000 | 12 | 80.550.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 49 | 1.200.000 | 42 | 1.215.000 | 37 | 1.235.000 | 33 | 1.265.000 | 30 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 16 | 1.200.000 | 18 | 1.215.000 | 21 | 1.235.000 | 25 | 1.265.000 | 28 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.200.000 | 8 | 1.215.000 | 8 | 1.235.000 | 8 | 1.265.000 | 8 | 1.295.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 99,97 | 95 | 95 | 18.700.000 | 95 | 18.910.000 | 95 | 19.195.000 | 95 | 19.590.000 | 95 | 20.050.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 11.200.000 | | 11.325.000 | | 11.495.000 | | 11.730.000 | | 12.005.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 11.200.000 | 12 | 11.325.000 | 12 | 11.495.000 | 12 | 11.730.000 | 12 | 12.005.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 7.500.000 | | 7.585.000 | | 7.700.000 | | 7.860.000 | | 8.045.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 7.500.000 | 12 | 7.585.000 | 12 | 7.700.000 | 12 | 7.860.000 | 12 | 8.045.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 5.363 | 5.383 | 5.403 | 18.000.000 | 5.423 | 18.200.000 | 5.443 | 18.475.000 | 5.463 | 18.855.000 | 5.483 | 19.300.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 18.000.000 | | 18.200.000 | | 18.475.000 | | 18.855.000 | | 19.300.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan | 4 | 12 | 12 | 18.000.000 | 12 | 18.200.000 | 12 | 18.475.000 | 12 | 18.855.000 | 12 | 19.300.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 14.100.000 | 30 | 14.270.000 | 35 | 14.500.000 | 40 | 14.810.000 | 45 | 15.165.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 174,29 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 14.100.000 | | 14.270.000 | | 14.500.000 | | 14.810.000 | | 15.165.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 165 | 100 | 100 | 14.100.000 | 100 | 14.270.000 | 100 | 14.500.000 | 100 | 14.810.000 | 100 | 15.165.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 131,36 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 1.500.000 | | 1.520.000 | | 1.545.000 | | 1.580.000 | | 1.620.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 11.647 | 11.890 | 13.040 | 1.500.000 | 13.030 | 1.520.000 | 13.020 | 1.545.000 | 13.010 | 1.580.000 | 13.000 | 1.620.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.847 | 2.989 | 3.043 | 2.000.000 | 3.089 | 2.025.000 | 3.135 | 2.060.000 | 3.182 | 2.105.000 | 3.230 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.404 | 3.950 | 3.951 | 2.000.000 | 3.952 | 2.025.000 | 3.953 | 2.060.000 | 3.954 | 2.105.000 | 3.954 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 431 | 343 | 343 | 2.000.000 | 344 | 2.025.000 | 344 | 2.060.000 | 344 | 2.105.000 | 345 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 6.600.000 | | 6.675.000 | | 6.775.000 | | 6.915.000 | | 7.080.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 74 | 74 | 74 | 6.600.000 | 76 | 6.675.000 | 78 | 6.775.000 | 80 | 6.915.000 | 82 | 7.080.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 14.094.000 | | 20.755.000 | | 21.070.000 | | 21.510.000 | | 22.025.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 28,5 | 75 | 80 | 14.094.000 | 85 | 20.755.000 | 90 | 21.070.000 | 95 | 21.510.000 | 100 | 22.025.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota& | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 14.094.000 | | 14.255.000 | | 14.470.000 | | 14.770.000 | | 15.120.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 14.094.000 | 18 | 14.255.000 | 21 | 14.470.000 | 24 | 14.770.000 | 27 | 15.120.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan | | | | | 14.094.000 | | 14.255.000 | | 14.470.000 | | 14.770.000 | | 15.120.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 14.094.000 | 4 | 14.255.000 | 4 | 14.470.000 | 4 | 14.770.000 | 4 | 15.120.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0015 - Puskesmas Pakuniran** | | | | | **2.833.492.395** | | **2.871.505.000** | | **2.914.370.000** | | **2.973.890.000** | | **3.043.535.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.418.786.395,00 | | 2.445.635.000,00 | | 2.482.075.000,00 | | 2.532.710.000,00 | | 2.591.980.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 92,6 | 92 | 92 | 2.418.786.395 | 93 | 2.445.635.000 | 93 | 2.482.075.000 | 94 | 2.532.710.000 | 94 | 2.591.980.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.418.786.395 | | 2.445.635.000 | | 2.482.075.000 | | 2.532.710.000 | | 2.591.980.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 2.418.786.395 | 4 | 2.445.635.000 | 4 | 2.482.075.000 | 4 | 2.532.710.000 | 5 | 2.591.980.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.418.786.395 | | 2.445.635.000 | | 2.482.075.000 | | 2.532.710.000 | | 2.591.980.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.418.786.395 | 1 | 2.445.635.000 | 1 | 2.482.075.000 | 1 | 2.532.710.000 | 1 | 2.591.980.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 403.706.000 | | 408.245.000 | | 414.400.000 | | 422.910.000 | | 432.850.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 61.094.000 | 100 | 61.775.000 | 100 | 62.700.000 | 100 | 63.980.000 | 100 | 65.480.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 61.094.000 | | 61.775.000 | | 62.700.000 | | 63.980.000 | | 65.480.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 78,29 | 85 | 87,8 | 61.094.000 | 90,6 | 61.775.000 | 93,4 | 62.700.000 | 96,2 | 63.980.000 | 99 | 65.480.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 61.094.000 | | 61.775.000 | | 62.700.000 | | 63.980.000 | | 65.480.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 61.094.000 | 4 | 61.775.000 | 4 | 62.700.000 | 4 | 63.980.000 | 4 | 65.480.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 5,44 | 5,16 | 4,87 | 231.572.000 | 4,58 | 234.165.000 | 4,3 | 237.675.000 | 4,01 | 242.545.000 | 3,72 | 248.230.000 | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 22,09085 | 19,88 | 19,88 | | 18,88 | | 17,49 | | 16,49 | | 15,01 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 231.572.000 | | 234.165.000 | | 237.675.000 | | 242.545.000 | | 248.230.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 86,17 | 87,67 | 89,17 | 119.672.000 | 90,67 | 121.005.000 | 90,72 | 122.810.000 | 90,77 | 125.320.000 | 90,82 | 128.255.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 119.672.000 | | 121.005.000 | | 122.810.000 | | 125.320.000 | | 128.255.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 119.672.000 | 12 | 121.005.000 | 12 | 122.810.000 | 12 | 125.320.000 | 12 | 128.255.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 75,92 | 77,92 | 79,92 | 111.900.000 | 81,92 | 113.160.000 | 83,92 | 114.865.000 | 85,92 | 117.225.000 | 87,92 | 119.975.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 82,11 | 82,61 | 83,11 | | 83,61 | | 84,11 | | 84,61 | | 85,11 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 51.400.000 | | 51.975.000 | | 52.750.000 | | 53.830.000 | | 55.090.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 288 | 325 | 302 | 51.400.000 | 300 | 51.975.000 | 298 | 52.750.000 | 296 | 53.830.000 | 294 | 55.090.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 302 | 350 | 302 | 1.000.000 | 300 | 1.015.000 | 298 | 1.035.000 | 296 | 1.060.000 | 294 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 8.000.000 | | 8.090.000 | | 8.215.000 | | 8.385.000 | | 8.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 303 | 329 | 303 | 8.000.000 | 301 | 8.090.000 | 299 | 8.215.000 | 297 | 8.385.000 | 295 | 8.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.453 | 1.205 | 1.453 | 1.000.000 | 1.444 | 1.015.000 | 1.435 | 1.035.000 | 1.426 | 1.060.000 | 1.417 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 44.800.000 | | 45.300.000 | | 45.975.000 | | 46.915.000 | | 48.015.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.233 | 1.898 | 2.468 | 44.800.000 | 2.476 | 45.300.000 | 2.484 | 45.975.000 | 2.492 | 46.915.000 | 2.500 | 48.015.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 5.700.000 | | 5.765.000 | | 5.855.000 | | 5.975.000 | | 6.115.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 4 | 4 | 5.700.000 | 4 | 5.765.000 | 4 | 5.855.000 | 4 | 5.975.000 | 4 | 6.115.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 187 | 95 | 96 | 75.980.000 | 97 | 76.845.000 | 98 | 78.020.000 | 99 | 79.630.000 | 100 | 81.510.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,039 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 40,00 | 48,33 | 56,67 | | 65,00 | | 73,33 | | 81,67 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 75.980.000 | | 76.845.000 | | 78.020.000 | | 79.630.000 | | 81.510.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 0,90 | 1 | 1 | 47.580.000 | 1 | 48.125.000 | 1 | 48.865.000 | 1 | 49.880.000 | 1 | 51.060.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 10.000.000 | | 10.115.000 | | 10.270.000 | | 10.480.000 | | 10.730.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 340 | 319 | 215 | 10.000.000 | 190 | 10.115.000 | 171 | 10.270.000 | 156 | 10.480.000 | 145 | 10.730.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 411 | 300 | 313 | 3.000.000 | 318 | 3.035.000 | 320 | 3.085.000 | 321 | 3.150.000 | 323 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 29.380.000 | | 29.710.000 | | 30.155.000 | | 30.775.000 | | 31.500.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 4 | 12 | 29.380.000 | 12 | 29.710.000 | 12 | 30.155.000 | 12 | 30.775.000 | 12 | 31.500.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 22 | 3.000.000 | 20 | 3.035.000 | 18 | 3.085.000 | 16 | 3.150.000 | 15 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 14 | 1.000.000 | 16 | 1.015.000 | 19 | 1.035.000 | 22 | 1.060.000 | 25 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.200.000 | 8 | 1.215.000 | 8 | 1.235.000 | 8 | 1.265.000 | 8 | 1.295.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 89,61 | 95 | 95 | 15.000.000 | 95 | 15.170.000 | 95 | 15.400.000 | 95 | 15.710.000 | 95 | 16.080.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 10.000.000 | | 10.115.000 | | 10.270.000 | | 10.480.000 | | 10.730.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.115.000 | 12 | 10.270.000 | 12 | 10.480.000 | 12 | 10.730.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 5.000.000 | | 5.055.000 | | 5.130.000 | | 5.230.000 | | 5.350.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.055.000 | 12 | 5.130.000 | 12 | 5.230.000 | 12 | 5.350.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 4.463 | 4.488 | 4.513 | 13.400.000 | 4.538 | 13.550.000 | 4.563 | 13.755.000 | 4.588 | 14.040.000 | 4.613 | 14.370.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 13.400.000 | | 13.550.000 | | 13.755.000 | | 14.040.000 | | 14.370.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 4 | 12 | 13.400.000 | 12 | 13.550.000 | 12 | 13.755.000 | 12 | 14.040.000 | 12 | 14.370.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 35.060.000 | 30 | 35.460.000 | 35 | 36.005.000 | 40 | 36.755.000 | 45 | 37.630.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 59,71 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 35.060.000 | | 35.460.000 | | 36.005.000 | | 36.755.000 | | 37.630.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 155 | 100 | 100 | 35.060.000 | 100 | 35.460.000 | 100 | 36.005.000 | 100 | 36.755.000 | 100 | 37.630.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 50,15 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 8.160.000 | | 8.255.000 | | 8.380.000 | | 8.555.000 | | 8.760.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 10.184 | 13.041 | 15.573 | 8.160.000 | 15.561 | 8.255.000 | 15.549 | 8.380.000 | 15.537 | 8.555.000 | 15.525 | 8.760.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 4.000.000 | | 4.045.000 | | 4.110.000 | | 4.195.000 | | 4.295.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.516 | 3.713 | 4.293 | 4.000.000 | 4.357 | 4.045.000 | 4.422 | 4.110.000 | 4.488 | 4.195.000 | 4.555 | 4.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 900.000 | | 910.000 | | 925.000 | | 945.000 | | 970.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.892 | 2.504 | 2.505 | 900.000 | 2.505 | 910.000 | 2.506 | 925.000 | 2.506 | 945.000 | 2.507 | 970.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 6.000.000 | | 6.070.000 | | 6.165.000 | | 6.295.000 | | 6.445.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 504 | 621 | 622 | 6.000.000 | 622 | 6.070.000 | 623 | 6.165.000 | 623 | 6.295.000 | 624 | 6.445.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 16.000.000 | | 16.180.000 | | 16.425.000 | | 16.765.000 | | 17.160.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 46 | 43 | 46 | 16.000.000 | 47 | 16.180.000 | 48 | 16.425.000 | 49 | 16.765.000 | 50 | 17.160.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 11.000.000 | | 17.625.000 | | 17.895.000 | | 18.270.000 | | 18.705.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 11.000.000 | 85 | 17.625.000 | 90 | 17.895.000 | 95 | 18.270.000 | 100 | 18.705.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 0 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 11.000.000 | | 11.125.000 | | 11.295.000 | | 11.530.000 | | 11.800.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | | 12 | 15 | 11.000.000 | 18 | 11.125.000 | 21 | 11.295.000 | 24 | 11.530.000 | 27 | 11.800.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 11.000.000 | | 11.125.000 | | 11.295.000 | | 11.530.000 | | 11.800.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 11.000.000 | 4 | 11.125.000 | 4 | 11.295.000 | 4 | 11.530.000 | 4 | 11.800.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0016 - Puskesmas Glagah** | | | | | **2.588.778.966** | | **2.624.070.000** | | **2.663.235.000** | | **2.717.630.000** | | **2.781.280.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.052.059.966,00 | | 2.074.840.000,00 | | 2.105.760.000,00 | | 2.148.720.000,00 | | 2.199.005.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 89,49 | 90 | 90 | 2.052.059.966 | 90 | 2.074.840.000 | 90 | 2.105.760.000 | 90 | 2.148.720.000 | 90 | 2.199.005.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.052.059.966 | | 2.074.840.000 | | 2.105.760.000 | | 2.148.720.000 | | 2.199.005.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 2.052.059.966 | 4 | 2.074.840.000 | 4 | 2.105.760.000 | 4 | 2.148.720.000 | 5 | 2.199.005.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.052.059.966 | | 2.074.840.000 | | 2.105.760.000 | | 2.148.720.000 | | 2.199.005.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.052.059.966 | 1 | 2.074.840.000 | 1 | 2.105.760.000 | 1 | 2.148.720.000 | 1 | 2.199.005.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 500.279.000 | | 505.885.000 | | 513.480.000 | | 524.010.000 | | 536.315.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 125.427.000 | 100 | 126.820.000 | 100 | 128.710.000 | 100 | 131.340.000 | 100 | 134.415.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 125.427.000 | | 126.820.000 | | 128.710.000 | | 131.340.000 | | 134.415.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 93,85 | 93,9 | 94,92 | 125.427.000 | 95,94 | 126.820.000 | 96,96 | 128.710.000 | 97,98 | 131.340.000 | 99 | 134.415.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 125.427.000 | | 126.820.000 | | 128.710.000 | | 131.340.000 | | 134.415.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 125.427.000 | 4 | 126.820.000 | 4 | 128.710.000 | 4 | 131.340.000 | 4 | 134.415.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 11,18587 | 10,07 | 9,06 | 247.652.000 | 9,06 | 250.415.000 | 8,34 | 254.165.000 | 8,34 | 259.365.000 | 8,34 | 265.450.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 8,46 | 8,09 | 7,72 | | 7,35 | | 6,99 | | 6,62 | | 5,88 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | | 0,8 | | 0,75 | | 0,7 | | 0,7 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 11 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 9 | | 8 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 247.652.000 | | 250.415.000 | | 254.165.000 | | 259.365.000 | | 265.450.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 90,31 | 90,81 | 91,31 | 202.372.000 | 91,81 | 204.620.000 | 93,31 | 207.670.000 | 93,81 | 211.910.000 | 94,31 | 216.870.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 202.372.000 | | 204.620.000 | | 207.670.000 | | 211.910.000 | | 216.870.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 202.372.000 | 12 | 204.620.000 | 12 | 207.670.000 | 12 | 211.910.000 | 12 | 216.870.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 75,52 | 77,52 | 79,52 | 45.280.000 | 81,52 | 45.795.000 | 83,52 | 46.495.000 | 85,52 | 47.455.000 | 87,52 | 48.580.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 79,34 | 79,84 | 80,34 | | 80,84 | | 81,34 | | 81,84 | | 82,34 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 22.680.000 | | 22.935.000 | | 23.280.000 | | 23.755.000 | | 24.315.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 233 | 255 | 246 | 22.680.000 | 244 | 22.935.000 | 242 | 23.280.000 | 240 | 23.755.000 | 238 | 24.315.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 246 | 292 | 246 | 3.000.000 | 244 | 3.035.000 | 242 | 3.085.000 | 240 | 3.150.000 | 238 | 3.225.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.500.000 | | 2.530.000 | | 2.570.000 | | 2.625.000 | | 2.690.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 242 | 293 | 242 | 2.500.000 | 240 | 2.530.000 | 238 | 2.570.000 | 236 | 2.625.000 | 234 | 2.690.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.400.000 | | 1.420.000 | | 1.445.000 | | 1.475.000 | | 1.510.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.109 | 998 | 1.109 | 1.400.000 | 1.102 | 1.420.000 | 1.095 | 1.445.000 | 1.088 | 1.475.000 | 1.081 | 1.510.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 13.900.000 | | 14.055.000 | | 14.265.000 | | 14.560.000 | | 14.905.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.126 | 2.210 | 2.417 | 13.900.000 | 2.425 | 14.055.000 | 2.433 | 14.265.000 | 2.441 | 14.560.000 | 2.449 | 14.905.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 146 | 95 | 96 | 100.500.000 | 97 | 101.640.000 | 98 | 103.175.000 | 99 | 105.305.000 | 100 | 107.785.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,000 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 0 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 42,9 | 50,75 | 58,6 | | 66,45 | | 74,3 | | 82,15 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 100.500.000 | | 101.640.000 | | 103.175.000 | | 105.305.000 | | 107.785.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,29 | 1 | 1 | 82.200.000 | 1 | 83.125.000 | 1 | 84.375.000 | 1 | 86.115.000 | 1 | 88.145.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 2.300.000 | | 2.330.000 | | 2.365.000 | | 2.415.000 | | 2.475.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 258 | 250 | 169 | 2.300.000 | 149 | 2.330.000 | 134 | 2.365.000 | 122 | 2.415.000 | 114 | 2.475.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 1.500.000 | | 1.520.000 | | 1.545.000 | | 1.580.000 | | 1.620.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 266 | 281 | 293 | 1.500.000 | 298 | 1.520.000 | 299 | 1.545.000 | 301 | 1.580.000 | 303 | 1.620.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 65.000.000 | | 65.720.000 | | 66.700.000 | | 68.065.000 | | 69.660.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 65.000.000 | 12 | 65.720.000 | 12 | 66.700.000 | 12 | 68.065.000 | 12 | 69.660.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan | | | | | 12.000.000 | | 12.135.000 | | 12.320.000 | | 12.575.000 | | 12.870.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 49 | 12.000.000 | 42 | 12.135.000 | 37 | 12.320.000 | 34 | 12.575.000 | 31 | 12.870.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 12 | 1.200.000 | 13 | 1.215.000 | 15 | 1.235.000 | 18 | 1.265.000 | 20 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 200.000 | | 205.000 | | 210.000 | | 215.000 | | 225.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 200.000 | 8 | 205.000 | 8 | 210.000 | 8 | 215.000 | 8 | 225.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 88,15 | 95 | 95 | 9.600.000 | 95 | 9.715.000 | 95 | 9.865.000 | 95 | 10.070.000 | 95 | 10.305.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.015.000 | 12 | 1.035.000 | 12 | 1.060.000 | 12 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 8.600.000 | | 8.700.000 | | 8.830.000 | | 9.010.000 | | 9.220.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 8.600.000 | 12 | 8.700.000 | 12 | 8.830.000 | 12 | 9.010.000 | 12 | 9.220.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 4.279 | 4.304 | 4.329 | 8.700.000 | 4.354 | 8.800.000 | 4.379 | 8.935.000 | 4.404 | 9.120.000 | 4.429 | 9.335.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 8.700.000 | | 8.800.000 | | 8.935.000 | | 9.120.000 | | 9.335.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 8.700.000 | 12 | 8.800.000 | 12 | 8.935.000 | 12 | 9.120.000 | 12 | 9.335.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 26.700.000 | 30 | 27.010.000 | 35 | 27.430.000 | 40 | 28.000.000 | 45 | 28.665.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 107,25 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 26.700.000 | | 27.010.000 | | 27.430.000 | | 28.000.000 | | 28.665.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 70,9 | 100 | 100 | 26.700.000 | 100 | 27.010.000 | 100 | 27.430.000 | 100 | 28.000.000 | 100 | 28.665.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 20,04 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 3.500.000 | | 3.540.000 | | 3.595.000 | | 3.670.000 | | 3.760.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7.066 | 9.250 | 13.189 | 3.500.000 | 13.178 | 3.540.000 | 13.167 | 3.595.000 | 13.156 | 3.670.000 | 13.145 | 3.760.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 8.400.000 | | 8.495.000 | | 8.625.000 | | 8.805.000 | | 9.015.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.860 | 3.038 | 3.882 | 8.400.000 | 3.940 | 8.495.000 | 3.999 | 8.625.000 | 4.059 | 8.805.000 | 4.120 | 9.015.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 1.400.000 | | 1.420.000 | | 1.445.000 | | 1.475.000 | | 1.510.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.038 | 1.406 | 1.406 | 1.400.000 | 1.407 | 1.420.000 | 1.407 | 1.445.000 | 1.407 | 1.475.000 | 1.408 | 1.510.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 1.400.000 | | 1.420.000 | | 1.445.000 | | 1.475.000 | | 1.510.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 319 | 246 | 246 | 1.400.000 | 246 | 1.420.000 | 247 | 1.445.000 | 247 | 1.475.000 | 247 | 1.510.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 12.000.000 | | 12.135.000 | | 12.320.000 | | 12.575.000 | | 12.870.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 54 | 51 | 54 | 12.000.000 | 55 | 12.135.000 | 56 | 12.320.000 | 57 | 12.575.000 | 58 | 12.870.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 36.440.000 | | 43.345.000 | | 43.995.000 | | 44.900.000 | | 45.960.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 36.440.000 | 85 | 43.345.000 | 90 | 43.995.000 | 95 | 44.900.000 | 100 | 45.960.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 36.440.000 | | 36.845.000 | | 37.395.000 | | 38.160.000 | | 39.055.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | | 12 | 15 | 36.440.000 | 18 | 36.845.000 | 21 | 37.395.000 | 24 | 38.160.000 | 27 | 39.055.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 36.440.000 | | 36.845.000 | | 37.395.000 | | 38.160.000 | | 39.055.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 36.440.000 | 4 | 36.845.000 | 4 | 37.395.000 | 4 | 38.160.000 | 4 | 39.055.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0017 - Puskesmas Kotaanyar** | | | | | **4.007.565.421** | | **4.058.605.000** | | **4.119.135.000** | | **4.203.230.000** | | **4.301.655.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.417.542.271,00 | | 3.455.480.000,00 | | 3.506.970.000,00 | | 3.578.515.000,00 | | 3.662.255.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 91,19 | 91 | 91 | 3.417.542.271 | 92 | 3.455.480.000 | 93 | 3.506.970.000 | 94 | 3.578.515.000 | 95 | 3.662.255.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 3.417.542.271 | | 3.455.480.000 | | 3.506.970.000 | | 3.578.515.000 | | 3.662.255.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 3.417.542.271 | 4 | 3.455.480.000 | 4 | 3.506.970.000 | 4 | 3.578.515.000 | 5 | 3.662.255.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 3.417.542.271 | | 3.455.480.000 | | 3.506.970.000 | | 3.578.515.000 | | 3.662.255.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 3.417.542.271 | 1 | 3.455.480.000 | 1 | 3.506.970.000 | 1 | 3.578.515.000 | 1 | 3.662.255.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 574.383.150 | | 580.810.000 | | 589.510.000 | | 601.590.000 | | 615.725.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 91.863.150 | 100 | 92.885.000 | 100 | 94.270.000 | 100 | 96.195.000 | 100 | 98.450.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | | | | | 91.863.150 | | 92.885.000 | | 94.270.000 | | 96.195.000 | | 98.450.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 97,42 | 97,5 | 97,8 | 91.863.150 | 98,1 | 92.885.000 | 98,4 | 94.270.000 | 98,7 | 96.195.000 | 99 | 98.450.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 91.863.150 | | 92.885.000 | | 94.270.000 | | 96.195.000 | | 98.450.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 91.863.150 | 4 | 92.885.000 | 4 | 94.270.000 | 4 | 96.195.000 | 4 | 98.450.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0,9 | 0 | 0,8 | 278.300.000 | 0,8 | 281.405.000 | 0,75 | 285.610.000 | 0,7 | 291.455.000 | 0,7 | 298.295.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 9,66 | 9,44 | 9,23 | | 9,01 | | 8,58 | | 8,15 | | 7,51 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 9 | 9 | 9 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 8,719758 | 7,85 | 7,85 | | 6,36 | | 5,72 | | 5,72 | | 5,72 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 278.300.000 | | 281.405.000 | | 285.610.000 | | 291.455.000 | | 298.295.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 95,5 | 96 | 96,5 | 153.800.000 | 97 | 155.510.000 | 98,5 | 157.830.000 | 99 | 161.050.000 | 99,5 | 164.820.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 153.800.000 | | 155.510.000 | | 157.830.000 | | 161.050.000 | | 164.820.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 153.800.000 | 12 | 155.510.000 | 12 | 157.830.000 | 12 | 161.050.000 | 12 | 164.820.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 62,21 | 65,21 | 68,21 | 124.500.000 | 71,21 | 125.895.000 | 74,21 | 127.780.000 | 77,21 | 130.405.000 | 80,21 | 133.475.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 87,38 | 87,88 | 88,38 | | 88,88 | | 89,38 | | 89,88 | | 90,38 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 65.000.000 | | 65.725.000 | | 66.705.000 | | 68.070.000 | | 69.665.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 433 | 461 | 450 | 65.000.000 | 447 | 65.725.000 | 444 | 66.705.000 | 441 | 68.070.000 | 438 | 69.665.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 300.000 | | 305.000 | | 310.000 | | 320.000 | | 330.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 450 | 481 | 450 | 300.000 | 447 | 305.000 | 444 | 310.000 | 441 | 320.000 | 438 | 330.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 5.200.000 | | 5.260.000 | | 5.340.000 | | 5.450.000 | | 5.580.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 443 | 459 | 443 | 5.200.000 | 440 | 5.260.000 | 437 | 5.340.000 | 434 | 5.450.000 | 431 | 5.580.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 5.200.000 | | 5.260.000 | | 5.340.000 | | 5.450.000 | | 5.580.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.937 | 1.846 | 2.014 | 5.200.000 | 2.002 | 5.260.000 | 1.990 | 5.340.000 | 1.978 | 5.450.000 | 1.966 | 5.580.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 44.500.000 | | 44.995.000 | | 45.670.000 | | 46.605.000 | | 47.700.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.290 | 3.950 | 3.710 | 44.500.000 | 3.722 | 44.995.000 | 3.734 | 45.670.000 | 3.746 | 46.605.000 | 3.758 | 47.700.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 4.300.000 | | 4.350.000 | | 4.415.000 | | 4.510.000 | | 4.620.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 4.300.000 | 4 | 4.350.000 | 4 | 4.415.000 | 4 | 4.510.000 | 4 | 4.620.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 127 | 95 | 96 | 168.220.000 | 97 | 170.110.000 | 98 | 172.665.000 | 99 | 176.210.000 | 100 | 180.355.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,027 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 66,7 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 46,2 | 53,5 | 60,8 | | 68,1 | | 75,4 | | 82,7 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 15,35 | 20 | 25 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 168.220.000 | | 170.110.000 | | 172.665.000 | | 176.210.000 | | 180.355.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,20 | 1 | 1 | 116.020.000 | 1 | 117.320.000 | 1 | 119.085.000 | 1 | 121.530.000 | 1 | 124.385.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 66,7 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 2.600.000 | | 2.630.000 | | 2.670.000 | | 2.725.000 | | 2.790.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 763 | 473 | 319 | 2.600.000 | 282 | 2.630.000 | 254 | 2.670.000 | 232 | 2.725.000 | 215 | 2.790.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 441 | 498 | 520 | 2.400.000 | 527 | 2.430.000 | 531 | 2.470.000 | 533 | 2.525.000 | 536 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 107.320.000 | | 108.510.000 | | 110.130.000 | | 112.380.000 | | 115.010.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 107.320.000 | 12 | 108.510.000 | 12 | 110.130.000 | 12 | 112.380.000 | 12 | 115.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 44 | 2.000.000 | 39 | 2.025.000 | 35 | 2.060.000 | 32 | 2.105.000 | 30 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.500.000 | | 1.520.000 | | 1.545.000 | | 1.580.000 | | 1.620.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 27 | 1.500.000 | 30 | 1.520.000 | 35 | 1.545.000 | 41 | 1.580.000 | 47 | 1.620.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 95,53 | 95 | 95 | 32.200.000 | 95 | 32.565.000 | 95 | 33.050.000 | 95 | 33.730.000 | 95 | 34.525.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 17.200.000 | | 17.395.000 | | 17.655.000 | | 18.020.000 | | 18.445.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 17.200.000 | 12 | 17.395.000 | 12 | 17.655.000 | 12 | 18.020.000 | 12 | 18.445.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 15.000.000 | | 15.170.000 | | 15.395.000 | | 15.710.000 | | 16.080.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.170.000 | 12 | 15.395.000 | 12 | 15.710.000 | 12 | 16.080.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 9.416 | 9.446 | 9.476 | 20.000.000 | 9.506 | 20.225.000 | 9.536 | 20.530.000 | 9.566 | 20.950.000 | 9.596 | 21.445.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 20.000.000 | | 20.225.000 | | 20.530.000 | | 20.950.000 | | 21.445.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.225.000 | 12 | 20.530.000 | 12 | 20.950.000 | 12 | 21.445.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 36.000.000 | 30 | 36.410.000 | 35 | 36.965.000 | 40 | 37.730.000 | 45 | 38.625.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 98,08 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 36.000.000 | | 36.410.000 | | 36.965.000 | | 37.730.000 | | 38.625.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 85,3 | 100 | 100 | 36.000.000 | 100 | 36.410.000 | 100 | 36.965.000 | 100 | 37.730.000 | 100 | 38.625.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 100,75 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 3.400.000 | | 3.440.000 | | 3.495.000 | | 3.570.000 | | 3.655.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 19.067 | 15.283 | 23.602 | 3.400.000 | 23.583 | 3.440.000 | 23.564 | 3.495.000 | 23.545 | 3.570.000 | 23.526 | 3.655.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 10.400.000 | | 10.520.000 | | 10.680.000 | | 10.900.000 | | 11.160.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5.270 | 5.211 | 6.463 | 10.400.000 | 6.560 | 10.520.000 | 6.658 | 10.680.000 | 6.758 | 10.900.000 | 6.859 | 11.160.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.600.000 | | 2.630.000 | | 2.670.000 | | 2.725.000 | | 2.790.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.354 | 2.135 | 2.135 | 2.600.000 | 2.136 | 2.630.000 | 2.136 | 2.670.000 | 2.137 | 2.725.000 | 2.137 | 2.790.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.600.000 | | 2.630.000 | | 2.670.000 | | 2.725.000 | | 2.790.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 695 | 845 | 846 | 2.600.000 | 847 | 2.630.000 | 847 | 2.670.000 | 848 | 2.725.000 | 849 | 2.790.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 17.000.000 | | 17.190.000 | | 17.450.000 | | 17.810.000 | | 18.230.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 94 | 91 | 94 | 17.000.000 | 96 | 17.190.000 | 98 | 17.450.000 | 100 | 17.810.000 | 102 | 18.230.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 15.640.000 | | 22.315.000 | | 22.655.000 | | 23.125.000 | | 23.675.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 15.640.000 | 85 | 22.315.000 | 90 | 22.655.000 | 95 | 23.125.000 | 100 | 23.675.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 15.640.000 | | 15.815.000 | | 16.055.000 | | 16.385.000 | | 16.770.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 15.640.000 | 18 | 15.815.000 | 21 | 16.055.000 | 24 | 16.385.000 | 27 | 16.770.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 15.640.000 | | 15.815.000 | | 16.055.000 | | 16.385.000 | | 16.770.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 15.640.000 | 4 | 15.815.000 | 4 | 16.055.000 | 4 | 16.385.000 | 4 | 16.770.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0018 - Puskesmas Paiton** | | | | | **4.048.416.842** | | **4.099.920.000** | | **4.161.080.000** | | **4.246.030.000** | | **4.345.440.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.346.010.042,00 | | 3.383.155.000,00 | | 3.433.565.000,00 | | 3.503.610.000,00 | | 3.585.595.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 90,45 | 90 | 90 | 3.346.010.042 | 90 | 3.383.155.000 | 92 | 3.433.565.000 | 93 | 3.503.610.000 | 94 | 3.585.595.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 3.346.010.042 | | 3.383.155.000 | | 3.433.565.000 | | 3.503.610.000 | | 3.585.595.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 3.346.010.042 | 4 | 3.383.155.000 | 4 | 3.433.565.000 | 4 | 3.503.610.000 | 5 | 3.585.595.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 3.346.010.042 | | 3.383.155.000 | | 3.433.565.000 | | 3.503.610.000 | | 3.585.595.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 3.346.010.042 | 1 | 3.383.155.000 | 1 | 3.433.565.000 | 1 | 3.503.610.000 | 1 | 3.585.595.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 674.509.200 | | 682.055.000 | | 692.280.000 | | 706.460.000 | | 723.035.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 107.458.000 | 100 | 108.655.000 | 100 | 110.275.000 | 100 | 112.525.000 | 100 | 115.160.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 107.458.000 | | 108.655.000 | | 110.275.000 | | 112.525.000 | | 115.160.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 94,09 | 94,59 | 95,09 | 107.458.000 | 95,59 | 108.655.000 | 97,09 | 110.275.000 | 97,59 | 112.525.000 | 98,09 | 115.160.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 107.458.000 | | 108.655.000 | | 110.275.000 | | 112.525.000 | | 115.160.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 107.458.000 | 4 | 108.655.000 | 4 | 110.275.000 | 4 | 112.525.000 | 4 | 115.160.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0,9 | 0 | 318.711.200 | 0 | 322.265.000 | 0 | 327.085.000 | 0 | 333.775.000 | 0 | 341.605.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 9,1 | 8,95 | 8,8 | | 8,64 | | 7,72 | | 7,1 | | 6,64 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 9 | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 7 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 6,65 | 5,99 | 5,39 | | 4,85 | | 4,36 | | 3,93 | | 3,53 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 318.711.200 | | 322.265.000 | | 327.085.000 | | 333.775.000 | | 341.605.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 12 | | 12 | 168.611.200 | 12 | 170.485.000 | 12 | 173.030.000 | 12 | 176.560.000 | 12 | 180.695.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 168.611.200 | | 170.485.000 | | 173.030.000 | | 176.560.000 | | 180.695.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 168.611.200 | 12 | 170.485.000 | 12 | 173.030.000 | 12 | 176.560.000 | 12 | 180.695.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 72,58 | 74,58 | 76,58 | 150.100.000 | 78,58 | 151.780.000 | 80,58 | 154.055.000 | 82,58 | 157.215.000 | 84,58 | 160.910.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 81,89 | 82,39 | 82,89 | | 83,39 | | 83,89 | | 84,39 | | 84,89 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 28.500.000 | | 28.820.000 | | 29.250.000 | | 29.850.000 | | 30.550.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 641 | 729 | 641 | 28.500.000 | 637 | 28.820.000 | 633 | 29.250.000 | 629 | 29.850.000 | 625 | 30.550.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 26.000.000 | | 26.290.000 | | 26.685.000 | | 27.230.000 | | 27.870.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 641 | 718 | 641 | 26.000.000 | 637 | 26.290.000 | 633 | 26.685.000 | 629 | 27.230.000 | 625 | 27.870.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 8.000.000 | | 8.090.000 | | 8.215.000 | | 8.385.000 | | 8.585.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 624 | 701 | 624 | 8.000.000 | 620 | 8.090.000 | 616 | 8.215.000 | 612 | 8.385.000 | 608 | 8.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.500.000 | | 1.520.000 | | 1.545.000 | | 1.580.000 | | 1.620.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.956 | 2.382 | 2.956 | 1.500.000 | 2.938 | 1.520.000 | 2.920 | 1.545.000 | 2.902 | 1.580.000 | 2.885 | 1.620.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 82.200.000 | | 83.115.000 | | 84.355.000 | | 86.080.000 | | 88.095.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 9.084 | 4.102 | 9.084 | 82.200.000 | 9.114 | 83.115.000 | 9.144 | 84.355.000 | 9.174 | 86.080.000 | 9.204 | 88.095.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 3.900.000 | | 3.945.000 | | 4.005.000 | | 4.090.000 | | 4.190.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 3.900.000 | 4 | 3.945.000 | 4 | 4.005.000 | 4 | 4.090.000 | 4 | 4.190.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 135 | 95 | 96 | 194.080.000 | 97 | 196.255.000 | 98 | 199.210.000 | 99 | 203.295.000 | 100 | 208.070.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,192 | 0,100 | 0,050 | | 0,049 | | 0,029 | | 0,019 | | 0,009 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 38,50 | 47,08 | 55,67 | | 64,25 | | 72,83 | | 81,42 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 194.080.000 | | 196.255.000 | | 199.210.000 | | 203.295.000 | | 208.070.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,58 | 1 | 1 | 137.780.000 | 1 | 139.325.000 | 1 | 141.425.000 | 1 | 144.320.000 | 1 | 147.715.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | 89 | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 10.000.000 | | 10.115.000 | | 10.270.000 | | 10.480.000 | | 10.730.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 743 | 648 | 437 | 10.000.000 | 386 | 10.115.000 | 347 | 10.270.000 | 317 | 10.480.000 | 295 | 10.730.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 7.800.000 | | 7.890.000 | | 8.010.000 | | 8.175.000 | | 8.370.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1.001 | 899 | 939 | 7.800.000 | 952 | 7.890.000 | 958 | 8.010.000 | 963 | 8.175.000 | 968 | 8.370.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 107.980.000 | | 109.180.000 | | 110.810.000 | | 113.070.000 | | 115.720.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 107.980.000 | 12 | 109.180.000 | 12 | 110.810.000 | 12 | 113.070.000 | 12 | 115.720.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 7.000.000 | | 7.080.000 | | 7.190.000 | | 7.340.000 | | 7.515.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 114 | 7.000.000 | 98 | 7.080.000 | 87 | 7.190.000 | 78 | 7.340.000 | 71 | 7.515.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 4.000.000 | | 4.045.000 | | 4.110.000 | | 4.195.000 | | 4.295.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 42 | 4.000.000 | 48 | 4.045.000 | 58 | 4.110.000 | 67 | 4.195.000 | 77 | 4.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.000.000 | 8 | 1.015.000 | 8 | 1.035.000 | 8 | 1.060.000 | 8 | 1.085.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 89,37 | 95 | 95 | 49.800.000 | 95 | 50.355.000 | 95 | 51.110.000 | 95 | 52.160.000 | 95 | 53.380.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 32.300.000 | | 32.660.000 | | 33.150.000 | | 33.830.000 | | 34.625.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 32.300.000 | 12 | 32.660.000 | 12 | 33.150.000 | 12 | 33.830.000 | 12 | 34.625.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 17.500.000 | | 17.695.000 | | 17.960.000 | | 18.330.000 | | 18.755.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 17.500.000 | 12 | 17.695.000 | 12 | 17.960.000 | 12 | 18.330.000 | 12 | 18.755.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 7.974 | 8.019 | 8.064 | 6.500.000 | 8.109 | 6.575.000 | 8.154 | 6.675.000 | 8.199 | 6.815.000 | 8.244 | 6.975.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 6.500.000 | | 6.575.000 | | 6.675.000 | | 6.815.000 | | 6.975.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 6.500.000 | 12 | 6.575.000 | 12 | 6.675.000 | 12 | 6.815.000 | 12 | 6.975.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 54.260.000 | 30 | 54.880.000 | 35 | 55.710.000 | 40 | 56.865.000 | 45 | 58.200.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 103,20 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 54.260.000 | | 54.880.000 | | 55.710.000 | | 56.865.000 | | 58.200.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 98,5 | 100 | 100 | 54.260.000 | 100 | 54.880.000 | 100 | 55.710.000 | 100 | 56.865.000 | 100 | 58.200.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 71,46 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 29.860.000 | | 30.195.000 | | 30.645.000 | | 31.275.000 | | 32.010.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 15.318 | 25.112 | 30.036 | 29.860.000 | 30.012 | 30.195.000 | 29.988 | 30.645.000 | 29.964 | 31.275.000 | 29.940 | 32.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 20.800.000 | | 21.035.000 | | 21.350.000 | | 21.790.000 | | 22.300.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6.577 | 6.578 | 6.680 | 20.800.000 | 6.780 | 21.035.000 | 6.882 | 21.350.000 | 6.985 | 21.790.000 | 7.090 | 22.300.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.345 | 2.734 | 2.735 | 1.000.000 | 2.735 | 1.015.000 | 2.736 | 1.035.000 | 2.736 | 1.060.000 | 2.737 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.636 | 1.294 | 1.294 | 1.000.000 | 1.296 | 1.015.000 | 1.297 | 1.035.000 | 1.298 | 1.060.000 | 1.299 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 1.600.000 | | 1.620.000 | | 1.645.000 | | 1.680.000 | | 1.720.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 92 | 88 | 92 | 1.600.000 | 94 | 1.620.000 | 96 | 1.645.000 | 98 | 1.680.000 | 100 | 1.720.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 27.897.600 | | 34.710.000 | | 35.235.000 | | 35.960.000 | | 36.810.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 21,27 | 75 | 80 | 27.897.600 | 85 | 34.710.000 | 90 | 35.235.000 | 95 | 35.960.000 | 100 | 36.810.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 27.897.600 | | 28.210.000 | | 28.635.000 | | 29.220.000 | | 29.905.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 27.897.600 | 18 | 28.210.000 | 21 | 28.635.000 | 24 | 29.220.000 | 27 | 29.905.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 27.897.600 | | 28.210.000 | | 28.635.000 | | 29.220.000 | | 29.905.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 27.897.600 | 4 | 28.210.000 | 4 | 28.635.000 | 4 | 29.220.000 | 4 | 29.905.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0019 - Puskesmas Jabungsisir** | | | | | **2.821.536.130** | | **2.859.410.000** | | **2.902.090.000** | | **2.961.360.000** | | **3.030.705.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.341.532.180,00 | | 2.367.525.000,00 | | 2.402.805.000,00 | | 2.451.825.000,00 | | 2.509.200.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 89,93 | 90 | 90 | 2.341.532.180 | 90 | 2.367.525.000 | 90 | 2.402.805.000 | 90 | 2.451.825.000 | 90 | 2.509.200.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.341.532.180 | | 2.367.525.000 | | 2.402.805.000 | | 2.451.825.000 | | 2.509.200.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 2.341.532.180 | 4 | 2.367.525.000 | 4 | 2.402.805.000 | 4 | 2.451.825.000 | 5 | 2.509.200.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.341.532.180 | | 2.367.525.000 | | 2.402.805.000 | | 2.451.825.000 | | 2.509.200.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.341.532.180 | 1 | 2.367.525.000 | 1 | 2.402.805.000 | 1 | 2.451.825.000 | 1 | 2.509.200.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 474.263.950 | | 479.580.000 | | 486.790.000 | | 496.775.000 | | 508.435.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 74.321.150 | 100 | 75.150.000 | 100 | 76.270.000 | 100 | 77.830.000 | 100 | 79.655.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 74.321.150 | | 75.150.000 | | 76.270.000 | | 77.830.000 | | 79.655.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 93,92 | 94 | 95 | 74.321.150 | 96 | 75.150.000 | 97 | 76.270.000 | 98 | 77.830.000 | 99 | 79.655.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 74.321.150 | | 75.150.000 | | 76.270.000 | | 77.830.000 | | 79.655.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 74.321.150 | 4 | 75.150.000 | 4 | 76.270.000 | 4 | 77.830.000 | 4 | 79.655.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | 255.562.800 | 0 | 258.420.000 | 0 | 262.290.000 | 0 | 267.655.000 | 0 | 273.930.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 5,17 | 4,91 | 4,65 | | 4,39 | | 4,13 | | 3,88 | | 3,36 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 6 | 6 | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 17,19 | 15,47 | 13,92 | | 13,92 | | 11,28 | | 10,8 | | 10,8 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 255.562.800 | | 258.420.000 | | 262.290.000 | | 267.655.000 | | 273.930.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 95,22 | 95,72 | 96,22 | 191.702.800 | 96,72 | 193.835.000 | 98,22 | 196.725.000 | 98,72 | 200.740.000 | 99,22 | 205.440.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 191.702.800 | | 193.835.000 | | 196.725.000 | | 200.740.000 | | 205.440.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 191.702.800 | 12 | 193.835.000 | 12 | 196.725.000 | 12 | 200.740.000 | 12 | 205.440.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 86,26 | 87,26 | 88,26 | 63.860.000 | 89,26 | 64.585.000 | 90,26 | 65.565.000 | 91,26 | 66.915.000 | 92,26 | 68.490.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 92,11 | 92,11 | 92,11 | | 92,11 | | 92,11 | | 92,11 | | 92,11 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 31.360.000 | | 31.710.000 | | 32.185.000 | | 32.845.000 | | 33.615.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 351 | 326 | 356 | 31.360.000 | 354 | 31.710.000 | 352 | 32.185.000 | 350 | 32.845.000 | 348 | 33.615.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 356 | 356 | 356 | 2.400.000 | 354 | 2.430.000 | 352 | 2.470.000 | 350 | 2.525.000 | 348 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 350 | 355 | 350 | 2.000.000 | 348 | 2.025.000 | 346 | 2.060.000 | 344 | 2.105.000 | 342 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.400.000 | | 1.420.000 | | 1.445.000 | | 1.475.000 | | 1.510.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.474 | 1.400 | 1.474 | 1.400.000 | 1.465 | 1.420.000 | 1.456 | 1.445.000 | 1.447 | 1.475.000 | 1.438 | 1.510.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 22.200.000 | | 22.450.000 | | 22.785.000 | | 23.250.000 | | 23.795.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan | 2.647 | 3.222 | 2.867 | 22.200.000 | 2.876 | 22.450.000 | 2.885 | 22.785.000 | 2.895 | 23.250.000 | 2.905 | 23.795.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 4.500.000 | | 4.550.000 | | 4.620.000 | | 4.715.000 | | 4.830.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.550.000 | 4 | 4.620.000 | 4 | 4.715.000 | 4 | 4.830.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 114 | 95 | 96 | 134.980.000 | 97 | 136.495.000 | 98 | 138.555.000 | 99 | 141.405.000 | 100 | 144.730.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,132 | 0,100 | 0,050 | | 0,049 | | 0,029 | | 0,019 | | 0,009 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 66,7 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 42,9 | 50,75 | 58,6 | | 66,45 | | 74,3 | | 82,15 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 134.980.000 | | 136.495.000 | | 138.555.000 | | 141.405.000 | | 144.730.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,62 | 1 | 1 | 88.780.000 | 1 | 89.775.000 | 1 | 91.130.000 | 1 | 93.005.000 | 1 | 95.190.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 66,7 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 6.000.000 | | 6.070.000 | | 6.165.000 | | 6.295.000 | | 6.445.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 312 | 285 | 192 | 6.000.000 | 170 | 6.070.000 | 153 | 6.165.000 | 140 | 6.295.000 | 130 | 6.445.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 441 | 361 | 377 | 3.000.000 | 382 | 3.035.000 | 385 | 3.085.000 | 387 | 3.150.000 | 389 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 74.980.000 | | 75.810.000 | | 76.940.000 | | 78.510.000 | | 80.350.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 74.980.000 | 12 | 75.810.000 | 12 | 76.940.000 | 12 | 78.510.000 | 12 | 80.350.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 2.200.000 | | 2.225.000 | | 2.260.000 | | 2.310.000 | | 2.365.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 36 | 2.200.000 | 32 | 2.225.000 | 29 | 2.260.000 | 26 | 2.310.000 | 24 | 2.365.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 11 | 1.200.000 | 12 | 1.215.000 | 14 | 1.235.000 | 17 | 1.265.000 | 20 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.400.000 | | 1.420.000 | | 1.445.000 | | 1.475.000 | | 1.510.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.400.000 | 8 | 1.420.000 | 8 | 1.445.000 | 8 | 1.475.000 | 8 | 1.510.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 88,66 | 95 | 95 | 27.400.000 | 95 | 27.710.000 | 95 | 28.130.000 | 95 | 28.710.000 | 95 | 29.385.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 20.400.000 | | 20.630.000 | | 20.940.000 | | 21.370.000 | | 21.875.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 20.400.000 | 12 | 20.630.000 | 12 | 20.940.000 | 12 | 21.370.000 | 12 | 21.875.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 7.000.000 | | 7.080.000 | | 7.190.000 | | 7.340.000 | | 7.510.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.080.000 | 12 | 7.190.000 | 12 | 7.340.000 | 12 | 7.510.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 5.786 | 5.811 | 5.836 | 18.800.000 | 5.861 | 19.010.000 | 5.886 | 19.295.000 | 5.911 | 19.690.000 | 5.936 | 20.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 18.800.000 | | 19.010.000 | | 19.295.000 | | 19.690.000 | | 20.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 18.800.000 | 12 | 19.010.000 | 12 | 19.295.000 | 12 | 19.690.000 | 12 | 20.155.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 9.400.000 | 30 | 9.515.000 | 35 | 9.675.000 | 40 | 9.885.000 | 45 | 10.120.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 226,13 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 9.400.000 | | 9.515.000 | | 9.675.000 | | 9.885.000 | | 10.120.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 48,6 | 100 | 100 | 9.400.000 | 100 | 9.515.000 | 100 | 9.675.000 | 100 | 9.885.000 | 100 | 10.120.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 65,53 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 8.041 | 10.373 | 14.851 | 2.000.000 | 14.839 | 2.025.000 | 14.827 | 2.060.000 | 14.815 | 2.105.000 | 14.803 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 1.800.000 | | 1.820.000 | | 1.850.000 | | 1.890.000 | | 1.935.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.912 | 3.276 | 3.491 | 1.800.000 | 3.543 | 1.820.000 | 3.596 | 1.850.000 | 3.650 | 1.890.000 | 3.705 | 1.935.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 800 | 1.254 | 1.254 | 2.000.000 | 1.255 | 2.025.000 | 1.255 | 2.060.000 | 1.255 | 2.105.000 | 1.255 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 379 | 774 | 775 | 2.000.000 | 776 | 2.025.000 | 776 | 2.060.000 | 777 | 2.105.000 | 778 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 1.600.000 | | 1.620.000 | | 1.645.000 | | 1.680.000 | | 1.720.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 109 | 109 | 109 | 1.600.000 | 112 | 1.620.000 | 115 | 1.645.000 | 118 | 1.680.000 | 121 | 1.720.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 5.740.000 | | 12.305.000 | | 12.495.000 | | 12.760.000 | | 13.070.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 5.740.000 | 85 | 12.305.000 | 90 | 12.495.000 | 95 | 12.760.000 | 100 | 13.070.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 5.740.000 | | 5.805.000 | | 5.895.000 | | 6.020.000 | | 6.165.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 5.740.000 | 18 | 5.805.000 | 21 | 5.895.000 | 24 | 6.020.000 | 27 | 6.165.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 5.740.000 | | 5.805.000 | | 5.895.000 | | 6.020.000 | | 6.165.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 5.740.000 | 4 | 5.805.000 | 4 | 5.895.000 | 4 | 6.020.000 | 4 | 6.165.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| **1.02.0.00.0.00.00.0020 - Puskesmas Besuk** | | | | | **3.003.017.506** | | **3.042.905.000** | | **3.088.320.000** | | **3.151.390.000** | | **3.225.180.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.438.548.006,00 | | 2.465.620.000,00 | | 2.502.360.000,00 | | 2.553.410.000,00 | | 2.613.160.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 93,3 | 93 | 93 | 2.438.548.006 | 93 | 2.465.620.000 | 93 | 2.502.360.000 | 94 | 2.553.410.000 | 94 | 2.613.160.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.438.548.006 | | 2.465.620.000 | | 2.502.360.000 | | 2.553.410.000 | | 2.613.160.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 2.438.548.006 | 4 | 2.465.620.000 | 4 | 2.502.360.000 | 4 | 2.553.410.000 | 5 | 2.613.160.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.438.548.006 | | 2.465.620.000 | | 2.502.360.000 | | 2.553.410.000 | | 2.613.160.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.438.548.006 | 1 | 2.465.620.000 | 1 | 2.502.360.000 | 1 | 2.553.410.000 | 1 | 2.613.160.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 559.453.500 | | 565.710.000 | | 574.205.000 | | 585.975.000 | | 599.725.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 71.765.500 | 100 | 72.565.000 | 100 | 73.650.000 | 100 | 75.155.000 | 100 | 76.915.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 71.765.500 | | 72.565.000 | | 73.650.000 | | 75.155.000 | | 76.915.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 96,84 | 96,9 | 97,32 | 71.765.500 | 97,74 | 72.565.000 | 98,16 | 73.650.000 | 98,58 | 75.155.000 | 99 | 76.915.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 71.765.500 | | 72.565.000 | | 73.650.000 | | 75.155.000 | | 76.915.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 71.765.500 | 4 | 72.565.000 | 4 | 73.650.000 | 4 | 75.155.000 | 4 | 76.915.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | 283.380.000 | 0 | 286.545.000 | 0 | 290.835.000 | 0 | 296.785.000 | 0 | 303.740.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 10,76 | 10,53 | 10,3 | | 10,07 | | 9,61 | | 9,15 | | 8,47 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 8 | 8 | 8 | | 8 | | 7 | | 7 | | 7 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 9,19 | 8,27 | 7,44 | | 6,7 | | 6,03 | | 6,03 | | 6,03 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 283.380.000 | | 286.545.000 | | 290.835.000 | | 296.785.000 | | 303.740.000 | |
| Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 66,6 | 69,6 | 72,6 | 115.740.000 | 75,6 | 117.040.000 | 78,6 | 118.800.000 | 81,6 | 121.240.000 | 84,6 | 124.085.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 91,76 | 92,18 | 92,18 | | 92,18 | | 92,18 | | 92,18 | | 92,18 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 84.240.000 | | 85.180.000 | | 86.450.000 | | 88.215.000 | | 90.280.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 377 | 598 | 421 | 84.240.000 | 418 | 85.180.000 | 415 | 86.450.000 | 412 | 88.215.000 | 409 | 90.280.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 421 | 410 | 421 | 3.000.000 | 418 | 3.035.000 | 415 | 3.085.000 | 412 | 3.150.000 | 409 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 401 | 410 | 401 | 2.000.000 | 398 | 2.025.000 | 395 | 2.060.000 | 392 | 2.105.000 | 389 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.800.000 | | 1.820.000 | | 1.850.000 | | 1.890.000 | | 1.935.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.649 | 1.510 | 1.649 | 1.800.000 | 1.639 | 1.820.000 | 1.629 | 1.850.000 | 1.619 | 1.890.000 | 1.609 | 1.935.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 19.400.000 | | 19.620.000 | | 19.915.000 | | 20.325.000 | | 20.805.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.941 | 3.874 | 4.290 | 19.400.000 | 4.304 | 19.620.000 | 4.318 | 19.915.000 | 4.332 | 20.325.000 | 4.346 | 20.805.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 5.300.000 | | 5.360.000 | | 5.440.000 | | 5.555.000 | | 5.685.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 5.300.000 | 4 | 5.360.000 | 4 | 5.440.000 | 4 | 5.555.000 | 4 | 5.685.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 91,82 | 92,32 | 92,82 | 167.640.000 | 93,32 | 169.505.000 | 94,82 | 172.035.000 | 95,32 | 175.545.000 | 95,82 | 179.655.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 167.640.000 | | 169.505.000 | | 172.035.000 | | 175.545.000 | | 179.655.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 167.640.000 | 12 | 169.505.000 | 12 | 172.035.000 | 12 | 175.545.000 | 12 | 179.655.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 203 | 95 | 96 | 167.988.000 | 97 | 169.865.000 | 98 | 172.420.000 | 99 | 175.960.000 | 100 | 180.090.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,100 | 0,100 | 0,050 | | 0,049 | | 0,029 | | 0,019 | | 0,009 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 77,80 | 79,83 | 81,87 | | 83,90 | | 85,93 | | 87,97 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 33,33 | 35 | 40 | | 45 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 167.988.000 | | 169.865.000 | | 172.420.000 | | 175.960.000 | | 180.090.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,06 | 1 | 1 | 130.500.000 | 1 | 131.955.000 | 1 | 133.940.000 | 1 | 136.685.000 | 1 | 139.895.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 10.800.000 | | 10.920.000 | | 11.085.000 | | 11.315.000 | | 11.580.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 506 | 436 | 294 | 10.800.000 | 260 | 10.920.000 | 234 | 11.085.000 | 213 | 11.315.000 | 198 | 11.580.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 627 | 625 | 653 | 3.000.000 | 662 | 3.035.000 | 666 | 3.085.000 | 670 | 3.150.000 | 673 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 100.000.000 | | 101.110.000 | | 102.620.000 | | 104.710.000 | | 107.165.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 100.000.000 | 12 | 101.110.000 | 12 | 102.620.000 | 12 | 104.710.000 | 12 | 107.165.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 6.500.000 | | 6.575.000 | | 6.675.000 | | 6.815.000 | | 6.975.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 74 | 6.500.000 | 64 | 6.575.000 | 56 | 6.675.000 | 50 | 6.815.000 | 46 | 6.975.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 12 | 34 | 1.200.000 | 37 | 1.215.000 | 45 | 1.235.000 | 52 | 1.265.000 | 60 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 9.000.000 | | 9.100.000 | | 9.240.000 | | 9.430.000 | | 9.655.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 9.000.000 | 8 | 9.100.000 | 8 | 9.240.000 | 8 | 9.430.000 | 8 | 9.655.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 100,23 | 95 | 95 | 21.088.000 | 95 | 21.325.000 | 95 | 21.645.000 | 95 | 22.095.000 | 95 | 22.610.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 12.000.000 | | 12.135.000 | | 12.320.000 | | 12.575.000 | | 12.870.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.135.000 | 12 | 12.320.000 | 12 | 12.575.000 | 12 | 12.870.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 9.088.000 | | 9.190.000 | | 9.325.000 | | 9.520.000 | | 9.740.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 9.088.000 | 12 | 9.190.000 | 12 | 9.325.000 | 12 | 9.520.000 | 12 | 9.740.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 7.830 | 7.860 | 7.890 | 16.400.000 | 7.920 | 16.585.000 | 7.950 | 16.835.000 | 7.980 | 17.180.000 | 8.010 | 17.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 16.400.000 | | 16.585.000 | | 16.835.000 | | 17.180.000 | | 17.585.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 16.400.000 | 12 | 16.585.000 | 12 | 16.835.000 | 12 | 17.180.000 | 12 | 17.585.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 36.320.000 | 30 | 36.735.000 | 35 | 37.300.000 | 40 | 38.075.000 | 45 | 38.980.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 47,14 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 36.320.000 | | 36.735.000 | | 37.300.000 | | 38.075.000 | | 38.980.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 72 | 100 | 100 | 36.320.000 | 100 | 36.735.000 | 100 | 37.300.000 | 100 | 38.075.000 | 100 | 38.980.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 22,44 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 16.320.000 | | 16.505.000 | | 16.755.000 | | 17.100.000 | | 17.505.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 18.828 | 16.656 | 19.162 | 16.320.000 | 19.147 | 16.505.000 | 19.132 | 16.755.000 | 19.117 | 17.100.000 | 19.102 | 17.505.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 7.200.000 | | 7.280.000 | | 7.390.000 | | 7.545.000 | | 7.725.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.183 | 4.623 | 4.650 | 7.200.000 | 4.720 | 7.280.000 | 4.791 | 7.390.000 | 4.863 | 7.545.000 | 4.936 | 7.725.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.580 | 1.419 | 1.419 | 2.000.000 | 1.420 | 2.025.000 | 1.420 | 2.060.000 | 1.420 | 2.105.000 | 1.421 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 460 | 141 | 141 | 2.000.000 | 141 | 2.025.000 | 141 | 2.060.000 | 142 | 2.105.000 | 142 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 8.800.000 | | 8.900.000 | | 9.035.000 | | 9.220.000 | | 9.440.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 28 | 23 | 30 | 8.800.000 | 31 | 8.900.000 | 32 | 9.035.000 | 33 | 9.220.000 | 34 | 9.440.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 5.016.000 | | 11.575.000 | | 11.755.000 | | 12.005.000 | | 12.295.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 2,7 | 75 | 80 | 5.016.000 | 85 | 11.575.000 | 90 | 11.755.000 | 95 | 12.005.000 | 100 | 12.295.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 5.016.000 | | 5.075.000 | | 5.155.000 | | 5.265.000 | | 5.390.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 5.016.000 | 18 | 5.075.000 | 21 | 5.155.000 | 24 | 5.265.000 | 27 | 5.390.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 5.016.000 | | 5.075.000 | | 5.155.000 | | 5.265.000 | | 5.390.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 5.016.000 | 4 | 5.075.000 | 4 | 5.155.000 | 4 | 5.265.000 | 4 | 5.390.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0021 - Puskesmas Bago** | | | | | **2.567.712.510** | | **2.602.760.000** | | **2.641.620.000** | | **2.695.580.000** | | **2.758.705.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.017.853.510,00 | | 2.040.255.000,00 | | 2.070.655.000,00 | | 2.112.900.000,00 | | 2.162.345.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 90,87 | 90 | 90 | 2.017.853.510 | 90 | 2.040.255.000 | 90 | 2.070.655.000 | 90 | 2.112.900.000 | 90 | 2.162.345.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.017.853.510 | | 2.040.255.000 | | 2.070.655.000 | | 2.112.900.000 | | 2.162.345.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 2.017.853.510 | 4 | 2.040.255.000 | 4 | 2.070.655.000 | 4 | 2.112.900.000 | 5 | 2.162.345.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.017.853.510 | | 2.040.255.000 | | 2.070.655.000 | | 2.112.900.000 | | 2.162.345.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.017.853.510 | 1 | 2.040.255.000 | 1 | 2.070.655.000 | 1 | 2.112.900.000 | 1 | 2.162.345.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 541.859.000 | | 547.915.000 | | 556.150.000 | | 567.555.000 | | 580.870.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 99.079.000 | 100 | 100.180.000 | 100 | 101.675.000 | 100 | 103.750.000 | 100 | 106.180.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 99.079.000 | | 100.180.000 | | 101.675.000 | | 103.750.000 | | 106.180.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 96,74 | 96,8 | 97,24 | 99.079.000 | 97,68 | 100.180.000 | 98,12 | 101.675.000 | 98,56 | 103.750.000 | 99 | 106.180.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 99.079.000 | | 100.180.000 | | 101.675.000 | | 103.750.000 | | 106.180.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 99.079.000 | 4 | 100.180.000 | 4 | 101.675.000 | 4 | 103.750.000 | 4 | 106.180.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | 273.960.000 | 0 | 277.015.000 | 0 | 281.165.000 | 0 | 286.920.000 | 0 | 293.645.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 11,3 | 10,96 | 10,63 | | 10,3 | | 9,97 | | 9,63 | | 8,97 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 7 | 7 | 7 | | 7 | | 6 | | 6 | | 6 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 15,85 | 14,27 | 12,84 | | 12,84 | | 11,4 | | 10,36 | | 10,36 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 273.960.000 | | 277.015.000 | | 281.165.000 | | 286.920.000 | | 293.645.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 55,39 | 59,39 | 63,39 | 148.400.000 | 67,39 | 150.060.000 | 71,39 | 152.315.000 | 75,39 | 155.440.000 | 79,39 | 159.085.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 60,05 | 62,55 | 65,05 | | 67,55 | | 70,05 | | 72,55 | | 75,05 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 104.000.000 | | 105.155.000 | | 106.725.000 | | 108.905.000 | | 111.455.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 212 | 309 | 232 | 104.000.000 | 230 | 105.155.000 | 228 | 106.725.000 | 226 | 108.905.000 | 224 | 111.455.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 232 | 319 | 232 | 2.400.000 | 230 | 2.430.000 | 228 | 2.470.000 | 226 | 2.525.000 | 224 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 230 | 294 | 230 | 2.000.000 | 228 | 2.025.000 | 226 | 2.060.000 | 224 | 2.105.000 | 222 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.600.000 | | 1.620.000 | | 1.645.000 | | 1.680.000 | | 1.720.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.240 | 1.229 | 1.240 | 1.600.000 | 1.233 | 1.620.000 | 1.226 | 1.645.000 | 1.219 | 1.680.000 | 1.212 | 1.720.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 32.400.000 | | 32.760.000 | | 33.250.000 | | 33.930.000 | | 34.725.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan | 1.833 | 1.896 | 2.047 | 32.400.000 | 2.054 | 32.760.000 | 2.061 | 33.250.000 | 2.068 | 33.930.000 | 2.075 | 34.725.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 6.000.000 | | 6.070.000 | | 6.165.000 | | 6.295.000 | | 6.445.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 0 | 12 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.070.000 | 4 | 6.165.000 | 4 | 6.295.000 | 4 | 6.445.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 89,21 | 90,71 | 92,21 | 125.560.000 | 93,71 | 126.955.000 | 93,76 | 128.850.000 | 93,81 | 131.480.000 | 93,86 | 134.560.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 125.560.000 | | 126.955.000 | | 128.850.000 | | 131.480.000 | | 134.560.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 0 | 12 | 12 | 125.560.000 | 12 | 126.955.000 | 12 | 128.850.000 | 12 | 131.480.000 | 12 | 134.560.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 237 | 95 | 96 | 149.220.000 | 97 | 150.890.000 | 98 | 153.165.000 | 99 | 156.315.000 | 100 | 159.985.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,046 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 12,50 | 25,42 | 38,33 | | 51,25 | | 64,17 | | 77,08 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | | | | | 149.220.000 | | 150.890.000 | | 153.165.000 | | 156.315.000 | | 159.985.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 0,88 | 1 | 1 | 86.548.000 | 1 | 87.515.000 | 1 | 88.840.000 | 1 | 90.670.000 | 1 | 92.795.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 13.000.000 | | 13.145.000 | | 13.345.000 | | 13.620.000 | | 13.940.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 285 | 250 | 169 | 13.000.000 | 149 | 13.145.000 | 134 | 13.345.000 | 122 | 13.620.000 | 114 | 13.940.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 334 | 282 | 294 | 3.000.000 | 299 | 3.035.000 | 300 | 3.085.000 | 302 | 3.150.000 | 304 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 68.148.000 | | 68.905.000 | | 69.935.000 | | 71.365.000 | | 73.035.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 68.148.000 | 12 | 68.905.000 | 12 | 69.935.000 | 12 | 71.365.000 | 12 | 73.035.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 800.000 | | 810.000 | | 825.000 | | 845.000 | | 865.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 52 | 800.000 | 45 | 810.000 | 40 | 825.000 | 36 | 845.000 | 33 | 865.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 800.000 | | 810.000 | | 825.000 | | 845.000 | | 865.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 22 | 800.000 | 25 | 810.000 | 30 | 825.000 | 34 | 845.000 | 39 | 865.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 800.000 | | 810.000 | | 825.000 | | 845.000 | | 865.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 800.000 | 8 | 810.000 | 8 | 825.000 | 8 | 845.000 | 8 | 865.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 72,96 | 95 | 95 | 48.772.000 | 95 | 49.320.000 | 95 | 50.060.000 | 95 | 51.085.000 | 95 | 52.285.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 41.200.000 | | 41.660.000 | | 42.285.000 | | 43.150.000 | | 44.160.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | 12 | 12 | 41.200.000 | 12 | 41.660.000 | 12 | 42.285.000 | 12 | 43.150.000 | 12 | 44.160.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 7.572.000 | | 7.660.000 | | 7.775.000 | | 7.935.000 | | 8.125.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 7.572.000 | 12 | 7.660.000 | 12 | 7.775.000 | 12 | 7.935.000 | 12 | 8.125.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 2.664 | 2.688 | 2.712 | 13.900.000 | 2.736 | 14.055.000 | 2.760 | 14.265.000 | 2.784 | 14.560.000 | 2.808 | 14.905.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 13.900.000 | | 14.055.000 | | 14.265.000 | | 14.560.000 | | 14.905.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan | 4 | 12 | 12 | 13.900.000 | 12 | 14.055.000 | 12 | 14.265.000 | 12 | 14.560.000 | 12 | 14.905.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 19.600.000 | 30 | 19.830.000 | 35 | 20.145.000 | 40 | 20.570.000 | 45 | 21.060.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 72,85 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 19.600.000 | | 19.830.000 | | 20.145.000 | | 20.570.000 | | 21.060.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 43 | 100 | 100 | 19.600.000 | 100 | 19.830.000 | 100 | 20.145.000 | 100 | 20.570.000 | 100 | 21.060.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 76,35 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 8.354 | 7.359 | 13.240 | 2.000.000 | 13.229 | 2.025.000 | 13.218 | 2.060.000 | 13.207 | 2.105.000 | 13.196 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 3.400.000 | | 3.440.000 | | 3.495.000 | | 3.570.000 | | 3.655.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.851 | 3.184 | 3.738 | 3.400.000 | 3.794 | 3.440.000 | 3.851 | 3.495.000 | 3.909 | 3.570.000 | 3.968 | 3.655.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 664 | 1.264 | 1.264 | 2.000.000 | 1.265 | 2.025.000 | 1.265 | 2.060.000 | 1.265 | 2.105.000 | 1.265 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 388 | 258 | 258 | 2.000.000 | 259 | 2.025.000 | 259 | 2.060.000 | 259 | 2.105.000 | 259 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 10.200.000 | | 10.315.000 | | 10.470.000 | | 10.685.000 | | 10.940.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 36 | 33 | 36 | 10.200.000 | 37 | 10.315.000 | 38 | 10.470.000 | 39 | 10.685.000 | 40 | 10.940.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 8.000.000 | | 14.590.000 | | 14.815.000 | | 15.125.000 | | 15.490.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 8.000.000 | 85 | 14.590.000 | 90 | 14.815.000 | 95 | 15.125.000 | 100 | 15.490.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 8.000.000 | | 8.090.000 | | 8.215.000 | | 8.385.000 | | 8.585.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 8.000.000 | 18 | 8.090.000 | 21 | 8.215.000 | 24 | 8.385.000 | 27 | 8.585.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan | | | | | 8.000.000 | | 8.090.000 | | 8.215.000 | | 8.385.000 | | 8.585.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.090.000 | 4 | 8.215.000 | 4 | 8.385.000 | 4 | 8.585.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0022 - Puskesmas Kraksaan** | | | | | **4.662.780.737** | | **4.721.100.000** | | **4.791.510.000** | | **4.889.330.000** | | **5.003.790.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.683.429.907,00 | | 3.724.320.000,00 | | 3.779.815.000,00 | | 3.856.925.000,00 | | 3.947.180.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 94,35 | 94 | 94 | 3.683.429.907 | 94 | 3.724.320.000 | 94 | 3.779.815.000 | 94 | 3.856.925.000 | 94 | 3.947.180.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 3.683.429.907 | | 3.724.320.000 | | 3.779.815.000 | | 3.856.925.000 | | 3.947.180.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 3.683.429.907 | 4 | 3.724.320.000 | 4 | 3.779.815.000 | 4 | 3.856.925.000 | 5 | 3.947.180.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 3.683.429.907 | | 3.724.320.000 | | 3.779.815.000 | | 3.856.925.000 | | 3.947.180.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 3.683.429.907 | 1 | 3.724.320.000 | 1 | 3.779.815.000 | 1 | 3.856.925.000 | 1 | 3.947.180.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 958.194.990 | | 968.885.000 | | 983.380.000 | | 1.003.505.000 | | 1.027.025.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 150.143.990 | 100 | 151.815.000 | 100 | 154.080.000 | 100 | 157.225.000 | 100 | 160.905.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 150.143.990 | | 151.815.000 | | 154.080.000 | | 157.225.000 | | 160.905.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 88,63 | 88,7 | 90,76 | 150.143.990 | 92,82 | 151.815.000 | 94,88 | 154.080.000 | 96,94 | 157.225.000 | 99 | 160.905.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 150.143.990 | | 151.815.000 | | 154.080.000 | | 157.225.000 | | 160.905.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 150.143.990 | 4 | 151.815.000 | 4 | 154.080.000 | 4 | 157.225.000 | 4 | 160.905.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 639.151.000 | 0,8 | 646.265.000 | 0,75 | 655.915.000 | 0,7 | 669.325.000 | 0,7 | 685.005.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 3,89 | 3,78 | 3,68 | | 3,57 | | 3,35 | | 3,24 | | 3,03 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 20 | 19 | 19 | | 18 | | 15 | | 14 | | 13 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 16,93 | 15,24 | 13,71 | | 12,34 | | 12,11 | | 11,8 | | 11,8 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 639.151.000 | | 646.265.000 | | 655.915.000 | | 669.325.000 | | 685.005.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 96,04 | 96,04 | 96,04 | 380.251.000 | 96,04 | 384.475.000 | 96,04 | 390.205.000 | 96,04 | 398.170.000 | 96,04 | 407.490.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 380.251.000 | | 384.475.000 | | 390.205.000 | | 398.170.000 | | 407.490.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 380.251.000 | 12 | 384.475.000 | 12 | 390.205.000 | 12 | 398.170.000 | 12 | 407.490.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 57,82 | 61,82 | 65,82 | 258.900.000 | 69,82 | 261.790.000 | 73,82 | 265.710.000 | 77,82 | 271.155.000 | 81,82 | 277.515.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 85,32 | 85,82 | 86,32 | | 86,82 | | 87,32 | | 87,82 | | 88,32 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 161.000.000 | | 162.790.000 | | 165.220.000 | | 168.595.000 | | 172.545.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 801 | 930 | 872 | 161.000.000 | 866 | 162.790.000 | 860 | 165.220.000 | 854 | 168.595.000 | 848 | 172.545.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 872 | 1.034 | 872 | 2.400.000 | 866 | 2.430.000 | 860 | 2.470.000 | 854 | 2.525.000 | 848 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 924 | 1.022 | 924 | 2.000.000 | 918 | 2.025.000 | 912 | 2.060.000 | 906 | 2.105.000 | 900 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 3.600.000 | | 3.640.000 | | 3.695.000 | | 3.775.000 | | 3.865.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.073 | 3.981 | 4.123 | 3.600.000 | 4.098 | 3.640.000 | 4.073 | 3.695.000 | 4.049 | 3.775.000 | 4.025 | 3.865.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 82.500.000 | | 83.420.000 | | 84.665.000 | | 86.395.000 | | 88.420.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 14.836 | 14.823 | 14.836 | 82.500.000 | 14.885 | 83.420.000 | 14.934 | 84.665.000 | 14.983 | 86.395.000 | 15.032 | 88.420.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 7.400.000 | | 7.485.000 | | 7.600.000 | | 7.760.000 | | 7.945.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 7.400.000 | 4 | 7.485.000 | 4 | 7.600.000 | 4 | 7.760.000 | 4 | 7.945.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 123 | 95 | 96 | 137.500.000 | 97 | 139.045.000 | 98 | 141.135.000 | 99 | 144.035.000 | 100 | 147.415.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,226 | 0,100 | 0,050 | | 0,049 | | 0,029 | | 0,019 | | 0,009 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 33,3 | 42,75 | 52,2 | | 61,65 | | 71,1 | | 80,55 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 137.500.000 | | 139.045.000 | | 141.135.000 | | 144.035.000 | | 147.415.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,66 | 1 | 1 | 80.210.000 | 1 | 81.115.000 | 1 | 82.340.000 | 1 | 84.035.000 | 1 | 86.005.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | 88 | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 6.000.000 | | 6.070.000 | | 6.165.000 | | 6.295.000 | | 6.445.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1.238 | 987 | 666 | 6.000.000 | 588 | 6.070.000 | 529 | 6.165.000 | 483 | 6.295.000 | 449 | 6.445.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1.491 | 1.385 | 1.446 | 2.400.000 | 1.467 | 2.430.000 | 1.476 | 2.470.000 | 1.484 | 2.525.000 | 1.491 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 69.210.000 | | 69.980.000 | | 71.025.000 | | 72.475.000 | | 74.170.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 69.210.000 | 12 | 69.980.000 | 12 | 71.025.000 | 12 | 72.475.000 | 12 | 74.170.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 1.600.000 | | 1.620.000 | | 1.645.000 | | 1.680.000 | | 1.720.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 104 | 1.600.000 | 92 | 1.620.000 | 83 | 1.645.000 | 76 | 1.680.000 | 70 | 1.720.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 600.000 | | 610.000 | | 620.000 | | 635.000 | | 650.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 72 | 600.000 | 79 | 610.000 | 96 | 620.000 | 111 | 635.000 | 127 | 650.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 400.000 | | 405.000 | | 415.000 | | 425.000 | | 435.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 400.000 | 8 | 405.000 | 8 | 415.000 | 8 | 425.000 | 8 | 435.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 87,88 | 95 | 95 | 49.490.000 | 95 | 50.040.000 | 95 | 50.785.000 | 95 | 51.825.000 | 95 | 53.040.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 41.800.000 | | 42.265.000 | | 42.895.000 | | 43.775.000 | | 44.800.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 0 | 12 | 12 | 41.800.000 | 12 | 42.265.000 | 12 | 42.895.000 | 12 | 43.775.000 | 12 | 44.800.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 7.690.000 | | 7.775.000 | | 7.890.000 | | 8.050.000 | | 8.240.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 7.690.000 | 12 | 7.775.000 | 12 | 7.890.000 | 12 | 8.050.000 | 12 | 8.240.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 12.532 | 12.602 | 12.672 | 7.800.000 | 12.742 | 7.890.000 | 12.812 | 8.010.000 | 12.882 | 8.175.000 | 12.952 | 8.370.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 7.800.000 | | 7.890.000 | | 8.010.000 | | 8.175.000 | | 8.370.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 7.800.000 | 12 | 7.890.000 | 12 | 8.010.000 | 12 | 8.175.000 | 12 | 8.370.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 31.400.000 | 30 | 31.760.000 | 35 | 32.250.000 | 40 | 32.920.000 | 45 | 33.700.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 78,72 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 31.400.000 | | 31.760.000 | | 32.250.000 | | 32.920.000 | | 33.700.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 69,9 | 100 | 100 | 31.400.000 | 100 | 31.760.000 | 100 | 32.250.000 | 100 | 32.920.000 | 100 | 33.700.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 48,06 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 4.400.000 | | 4.450.000 | | 4.520.000 | | 4.615.000 | | 4.725.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 24.766 | 32.496 | 44.920 | 4.400.000 | 44.884 | 4.450.000 | 44.848 | 4.520.000 | 44.812 | 4.615.000 | 44.776 | 4.725.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 12.600.000 | | 12.740.000 | | 12.930.000 | | 13.195.000 | | 13.505.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 9.148 | 10.529 | 9.545 | 12.600.000 | 9.688 | 12.740.000 | 9.833 | 12.930.000 | 9.980 | 13.195.000 | 10.130 | 13.505.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.606 | 5.431 | 5.432 | 2.000.000 | 5.433 | 2.025.000 | 5.435 | 2.060.000 | 5.436 | 2.105.000 | 5.437 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1111 | 741 | 742 | 2.000.000 | 742 | 2.025.000 | 743 | 2.060.000 | 744 | 2.105.000 | 745 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 10.400.000 | | 10.520.000 | | 10.680.000 | | 10.900.000 | | 11.160.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 120 | 120 | 120 | 10.400.000 | 123 | 10.520.000 | 126 | 10.680.000 | 129 | 10.900.000 | 132 | 11.160.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 21.155.840 | | 27.895.000 | | 28.315.000 | | 28.900.000 | | 29.585.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 100 | 75 | 80 | 21.155.840 | 85 | 27.895.000 | 90 | 28.315.000 | 95 | 28.900.000 | 100 | 29.585.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 21.155.840 | | 21.395.000 | | 21.715.000 | | 22.160.000 | | 22.680.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 21.155.840 | 18 | 21.395.000 | 21 | 21.715.000 | 24 | 22.160.000 | 27 | 22.680.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 21.155.840 | | 21.395.000 | | 21.715.000 | | 22.160.000 | | 22.680.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 21.155.840 | 4 | 21.395.000 | 4 | 21.715.000 | 4 | 22.160.000 | 4 | 22.680.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0023 - Puskesmas Krejengan** | | | | | **4.020.050.731** | | **4.071.235.000** | | **4.131.975.000** | | **4.216.340.000** | | **4.315.060.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.331.841.031,00 | | 3.368.825.000,00 | | 3.419.025.000,00 | | 3.488.775.000,00 | | 3.570.415.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 85,32 | 85 | 86 | 3.331.841.031 | 87 | 3.368.825.000 | 89 | 3.419.025.000 | 90 | 3.488.775.000 | 91 | 3.570.415.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 3.331.841.031 | | 3.368.825.000 | | 3.419.025.000 | | 3.488.775.000 | | 3.570.415.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 3.331.841.031 | 4 | 3.368.825.000 | 4 | 3.419.025.000 | 4 | 3.488.775.000 | 5 | 3.570.415.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 3.331.841.031 | | 3.368.825.000 | | 3.419.025.000 | | 3.488.775.000 | | 3.570.415.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 3.331.841.031 | 1 | 3.368.825.000 | 1 | 3.419.025.000 | 1 | 3.488.775.000 | 1 | 3.570.415.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 684.341.700 | | 691.995.000 | | 702.375.000 | | 716.765.000 | | 733.580.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 107.817.700 | 100 | 109.015.000 | 100 | 110.640.000 | 100 | 112.900.000 | 100 | 115.545.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 107.817.700 | | 109.015.000 | | 110.640.000 | | 112.900.000 | | 115.545.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 89,74 | 89,8 | 91,64 | 107.817.700 | 93,48 | 109.015.000 | 95,32 | 110.640.000 | 97,16 | 112.900.000 | 99 | 115.545.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 107.817.700 | | 109.015.000 | | 110.640.000 | | 112.900.000 | | 115.545.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 107.817.700 | 4 | 109.015.000 | 4 | 110.640.000 | 4 | 112.900.000 | 4 | 115.545.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 407.096.000 | 0,8 | 411.635.000 | 0,75 | 417.785.000 | 0,7 | 426.325.000 | 0,7 | 436.310.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 13,1 | 12,92 | 12,73 | | 12,55 | | 11,99 | | 11,44 | | 11,07 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 10,50 | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | | 8,89 | | 7,89 | | 7 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 407.096.000 | | 411.635.000 | | 417.785.000 | | 426.325.000 | | 436.310.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 92,44 | 92,94 | 93,44 | 241.196.000 | 93,94 | 243.875.000 | 95,44 | 247.510.000 | 95,94 | 252.560.000 | 96,44 | 258.470.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 241.196.000 | | 243.875.000 | | 247.510.000 | | 252.560.000 | | 258.470.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 241.196.000 | 12 | 243.875.000 | 12 | 247.510.000 | 12 | 252.560.000 | 12 | 258.470.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 63,68 | 66,68 | 69,68 | 165.900.000 | 72,68 | 167.760.000 | 75,68 | 170.275.000 | 78,68 | 173.765.000 | 81,68 | 177.840.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 89,35 | 90,25 | 90,25 | | 90,25 | | 90,25 | | 90,25 | | 90,25 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 51.000.000 | | 51.570.000 | | 52.340.000 | | 53.410.000 | | 54.660.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 419 | 426 | 517 | 51.000.000 | 513 | 51.570.000 | 509 | 52.340.000 | 505 | 53.410.000 | 501 | 54.660.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 517 | 532 | 517 | 1.000.000 | 513 | 1.015.000 | 509 | 1.035.000 | 505 | 1.060.000 | 501 | 1.085.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 7.900.000 | | 7.990.000 | | 8.110.000 | | 8.280.000 | | 8.475.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 495 | 510 | 495 | 7.900.000 | 492 | 7.990.000 | 489 | 8.110.000 | 486 | 8.280.000 | 483 | 8.475.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.194 | 2204 | 2.242 | 1.000.000 | 2.229 | 1.015.000 | 2.216 | 1.035.000 | 2.203 | 1.060.000 | 2.19 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 97.200.000 | | 98.280.000 | | 99.745.000 | | 101.780.000 | | 104.165.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.871 | 1645 | 5.409 | 97.200.000 | 5.427 | 98.280.000 | 5.445 | 99.745.000 | 5.463 | 101.780.000 | 5.481 | 104.165.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 7.800.000 | | 7.890.000 | | 8.010.000 | | 8.175.000 | | 8.370.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 0 | 12 | 4 | 7.800.000 | 4 | 7.890.000 | 4 | 8.010.000 | 4 | 8.175.000 | 4 | 8.370.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 163 | 95 | 96 | 125.928.000 | 97 | 127.350.000 | 98 | 129.280.000 | 99 | 131.945.000 | 100 | 135.050.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,000 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 5,90 | 19,92 | 33,93 | | 47,95 | | 61,97 | | 75,98 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 23,53 | 25 | 30 | | 35 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 125.928.000 | | 127.350.000 | | 129.280.000 | | 131.945.000 | | 135.050.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,15 | 1 | 1 | 82.820.000 | 1 | 83.760.000 | 1 | 85.035.000 | 1 | 86.790.000 | 1 | 88.825.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 7.000.000 | | 7.080.000 | | 7.190.000 | | 7.340.000 | | 7.515.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 510 | 517 | 349 | 7.000.000 | 308 | 7.080.000 | 277 | 7.190.000 | 253 | 7.340.000 | 235 | 7.515.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 731 | 549 | 573 | 1.000.000 | 581 | 1.015.000 | 585 | 1.035.000 | 588 | 1.060.000 | 591 | 1.085.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 71.820.000 | | 72.620.000 | | 73.705.000 | | 75.210.000 | | 76.970.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 71.820.000 | 12 | 72.620.000 | 12 | 73.705.000 | 12 | 75.210.000 | 12 | 76.970.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 102 | 1.000.000 | 88 | 1.015.000 | 78 | 1.035.000 | 70 | 1.060.000 | 64 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 40 | 1.000.000 | 44 | 1.015.000 | 53 | 1.035.000 | 62 | 1.060.000 | 71 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.000.000 | 8 | 1.015.000 | 8 | 1.035.000 | 8 | 1.060.000 | 8 | 1.085.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 88,82 | 95 | 95 | 24.308.000 | 95 | 24.580.000 | 95 | 24.950.000 | 95 | 25.465.000 | 95 | 26.070.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 16.328.000 | | 16.510.000 | | 16.760.000 | | 17.105.000 | | 17.510.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 16.328.000 | 12 | 16.510.000 | 12 | 16.760.000 | 12 | 17.105.000 | 12 | 17.510.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 7.980.000 | | 8.070.000 | | 8.190.000 | | 8.360.000 | | 8.560.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 7.980.000 | 12 | 8.070.000 | 12 | 8.190.000 | 12 | 8.360.000 | 12 | 8.560.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 10.644 | 10.694 | 10.744 | 18.800.000 | 10.794 | 19.010.000 | 10.844 | 19.295.000 | 10.894 | 19.690.000 | 10.944 | 20.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 18.800.000 | | 19.010.000 | | 19.295.000 | | 19.690.000 | | 20.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 18.800.000 | 12 | 19.010.000 | 12 | 19.295.000 | 12 | 19.690.000 | 12 | 20.155.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 43.500.000 | 30 | 43.995.000 | 35 | 44.670.000 | 40 | 45.595.000 | 45 | 46.675.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 92,08 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 43.500.000 | | 43.995.000 | | 44.670.000 | | 45.595.000 | | 46.675.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 90,9 | 100 | 100 | 43.500.000 | 100 | 43.995.000 | 100 | 44.670.000 | 100 | 45.595.000 | 100 | 46.675.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 95,28 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 23.300.000 | | 23.560.000 | | 23.915.000 | | 24.405.000 | | 24.980.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 20.865 | 14.057 | 26.439 | 23.300.000 | 26.418 | 23.560.000 | 26.397 | 23.915.000 | 26.376 | 24.405.000 | 26.355 | 24.980.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 10.200.000 | | 10.315.000 | | 10.470.000 | | 10.685.000 | | 10.940.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5.993 | 5.867 | 6.654 | 10.200.000 | 6.754 | 10.315.000 | 6.855 | 10.470.000 | 6.958 | 10.685.000 | 7.062 | 10.940.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.790 | 2.911 | 2.912 | 1.000.000 | 2.912 | 1.015.000 | 2.913 | 1.035.000 | 2.914 | 1.060.000 | 2.914 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.060 | 1.057 | 1.058 | 1.000.000 | 1.059 | 1.015.000 | 1.060 | 1.035.000 | 1.061 | 1.060.000 | 1.062 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 8.000.000 | | 8.090.000 | | 8.215.000 | | 8.385.000 | | 8.585.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 74 | 72 | 80 | 8.000.000 | 82 | 8.090.000 | 84 | 8.215.000 | 86 | 8.385.000 | 88 | 8.585.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN | | | | | 3.868.000 | | 10.415.000 | | 10.575.000 | | 10.800.000 | | 11.065.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 92 | 75 | 80 | 3.868.000 | 85 | 10.415.000 | 90 | 10.575.000 | 95 | 10.800.000 | 100 | 11.065.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya | | | | | 3.868.000 | | 3.915.000 | | 3.975.000 | | 4.060.000 | | 4.160.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 3.868.000 | 18 | 3.915.000 | 21 | 3.975.000 | 24 | 4.060.000 | 27 | 4.160.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 3.868.000 | | 3.915.000 | | 3.975.000 | | 4.060.000 | | 4.160.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 3.868.000 | 4 | 3.915.000 | 4 | 3.975.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.160.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0024 - Puskesmas Pajarakan** | | | | | **4.194.610.665** | | **4.247.735.000** | | **4.311.105.000** | | **4.399.110.000** | | **4.502.095.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.550.323.665,00 | | 3.589.735.000,00 | | 3.643.225.000,00 | | 3.717.550.000,00 | | 3.804.545.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 95,47 | 94 | 94 | 3.550.323.665 | 94 | 3.589.735.000 | 94 | 3.643.225.000 | 94 | 3.717.550.000 | 94 | 3.804.545.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 3.550.323.665 | | 3.589.735.000 | | 3.643.225.000 | | 3.717.550.000 | | 3.804.545.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 3.550.323.665 | 4 | 3.589.735.000 | 4 | 3.643.225.000 | 4 | 3.717.550.000 | 4 | 3.804.545.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 3.550.323.665 | | 3.589.735.000 | | 3.643.225.000 | | 3.717.550.000 | | 3.804.545.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 3.550.323.665 | 1 | 3.589.735.000 | 1 | 3.643.225.000 | 1 | 3.717.550.000 | 1 | 3.804.545.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN | | | | | 631.946.000 | | 639.020.000 | | 648.610.000 | | 661.890.000 | | 677.410.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 112.002.000 | 100 | 113.250.000 | 100 | 114.940.000 | 100 | 117.285.000 | 100 | 120.030.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 112.002.000 | | 113.250.000 | | 114.940.000 | | 117.285.000 | | 120.030.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 92,17 | 92,2 | 93,56 | 112.002.000 | 94,92 | 113.250.000 | 96,25 | 114.940.000 | 97,64 | 117.285.000 | 99 | 120.030.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 112.002.000 | | 113.250.000 | | 114.940.000 | | 117.285.000 | | 120.030.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 112.002.000 | 4 | 113.250.000 | 4 | 114.940.000 | 4 | 117.285.000 | 4 | 120.030.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | 317.124.000 | 0 | 320.665.000 | 0 | 325.465.000 | 0 | 332.125.000 | 0 | 339.910.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 16,44 | 16,05 | 15,86 | | 15,67 | | 14,51 | | 13,93 | | 13,54 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 10 | 10 | 9 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 10,65 | 9,59 | 8,63 | | 8,63 | | 7,99 | | 6,29 | | 5,66 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 317.124.000 | | 320.665.000 | | 325.465.000 | | 332.125.000 | | 339.910.000 | |
| Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 66,42 | 69,42 | 72,42 | 121.720.000 | 75,42 | 123.090.000 | 78,42 | 124.945.000 | 81,42 | 127.510.000 | 84,42 | 130.505.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 91,31 | 93,6 | 93,6 | | 93,6 | | 93,6 | | 93,6 | | 93,6 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 73.920.000 | | 74.745.000 | | 75.860.000 | | 77.410.000 | | 79.225.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 451 | 488 | 484 | 73.920.000 | 481 | 74.745.000 | 478 | 75.860.000 | 475 | 77.410.000 | 472 | 79.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 484 | 489 | 484 | 2.400.000 | 481 | 2.430.000 | 478 | 2.470.000 | 475 | 2.525.000 | 472 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 483 | 499 | 483 | 2.000.000 | 480 | 2.025.000 | 477 | 2.060.000 | 474 | 2.105.000 | 471 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.040 | 2.109 | 2.201 | 2.400.000 | 2.188 | 2.430.000 | 2.175 | 2.470.000 | 2.162 | 2.525.000 | 2.149 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 22.400.000 | | 22.650.000 | | 22.990.000 | | 23.460.000 | | 24.010.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6.641 | 6.783 | 6.641 | 22.400.000 | 6.663 | 22.650.000 | 6.685 | 22.990.000 | 6.707 | 23.460.000 | 6.729 | 24.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 18.600.000 | | 18.810.000 | | 19.095.000 | | 19.485.000 | | 19.945.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 18.600.000 | 4 | 18.810.000 | 4 | 19.095.000 | 4 | 19.485.000 | 4 | 19.945.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 195.404.000 | 98,7 | 197.575.000 | 98,7 | 200.520.000 | 98,7 | 204.615.000 | 98,7 | 209.405.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 195.404.000 | | 197.575.000 | | 200.520.000 | | 204.615.000 | | 209.405.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 195.404.000 | 12 | 197.575.000 | 12 | 200.520.000 | 12 | 204.615.000 | 12 | 209.405.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 126 | 95 | 96 | 175.940.000 | 97 | 177.915.000 | 98 | 180.595.000 | 99 | 184.295.000 | 100 | 188.620.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,000 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 80 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 0 | 15 | 30 | | 45 | | 60 | | 75 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 66,67 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 175.940.000 | | 177.915.000 | | 180.595.000 | | 184.295.000 | | 188.620.000 | |
| | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,88 | 1 | 1 | 132.506.000 | 1 | 133.990.000 | 1 | 136.010.000 | 1 | 138.800.000 | 1 | 142.060.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 80 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 28.400.000 | | 28.720.000 | | 29.150.000 | | 29.745.000 | | 30.445.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 569 | 574 | 387 | 28.400.000 | 342 | 28.720.000 | 308 | 29.150.000 | 281 | 29.745.000 | 261 | 30.445.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 563 | 507 | 529 | 3.000.000 | 537 | 3.035.000 | 540 | 3.085.000 | 543 | 3.150.000 | 546 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 89.406.000 | | 90.400.000 | | 91.750.000 | | 93.625.000 | | 95.820.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 89.406.000 | 12 | 90.400.000 | 12 | 91.750.000 | 12 | 93.625.000 | 12 | 95.820.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 6.700.000 | | 6.775.000 | | 6.880.000 | | 7.025.000 | | 7.190.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 64 | 6.700.000 | 57 | 6.775.000 | 51 | 6.880.000 | 47 | 7.025.000 | 43 | 7.190.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 25 | 1.000.000 | 28 | 1.015.000 | 33 | 1.035.000 | 39 | 1.060.000 | 44 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 4.000.000 | | 4.045.000 | | 4.110.000 | | 4.195.000 | | 4.295.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 4.000.000 | 8 | 4.045.000 | 8 | 4.110.000 | 8 | 4.195.000 | 8 | 4.295.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 85,05 | 95 | 95 | 27.534.000 | 95 | 27.845.000 | 95 | 28.265.000 | 95 | 28.840.000 | 95 | 29.515.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 17.600.000 | | 17.800.000 | | 18.070.000 | | 18.440.000 | | 18.875.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 17.600.000 | 12 | 17.800.000 | 12 | 18.070.000 | 12 | 18.440.000 | 12 | 18.875.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 9.934.000 | | 10.045.000 | | 10.195.000 | | 10.400.000 | | 10.640.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 9.934.000 | 12 | 10.045.000 | 12 | 10.195.000 | 12 | 10.400.000 | 12 | 10.640.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 9.554 | 9.604 | 9.654 | 15.900.000 | 9.704 | 16.080.000 | 9.754 | 16.320.000 | 9.804 | 16.655.000 | 9.854 | 17.045.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 15.900.000 | | 16.080.000 | | 16.320.000 | | 16.655.000 | | 17.045.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 15.900.000 | 12 | 16.080.000 | 12 | 16.320.000 | 12 | 16.655.000 | 12 | 17.045.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 26.880.000 | 30 | 27.190.000 | 35 | 27.610.000 | 40 | 28.185.000 | 45 | 28.850.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 148,78 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 26.880.000 | | 27.190.000 | | 27.610.000 | | 28.185.000 | | 28.850.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 76 | 100 | 100 | 26.880.000 | 100 | 27.190.000 | 100 | 27.610.000 | 100 | 28.185.000 | 100 | 28.850.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 109,17 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 10.480.000 | | 10.600.000 | | 10.760.000 | | 10.980.000 | | 11.240.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 15.589 | 17.489 | 21.979 | 10.480.000 | 21.961 | 10.600.000 | 21.943 | 10.760.000 | 21.925 | 10.980.000 | 21.907 | 11.240.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 1.800.000 | | 1.820.000 | | 1.850.000 | | 1.890.000 | | 1.935.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.870 | 5.364 | 5.230 | 1.800.000 | 5.308 | 1.820.000 | 5.388 | 1.850.000 | 5.469 | 1.890.000 | 5.551 | 1.935.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.943 | 2.027 | 2.027 | 2.000.000 | 2.028 | 2.025.000 | 2.028 | 2.060.000 | 2.029 | 2.105.000 | 2.029 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 576 | 818 | 819 | 2.000.000 | 820 | 2.025.000 | 820 | 2.060.000 | 821 | 2.105.000 | 822 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 10.600.000 | | 10.720.000 | | 10.880.000 | | 11.105.000 | | 11.365.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 110 | 106 | 112 | 10.600.000 | 115 | 10.720.000 | 118 | 10.880.000 | 121 | 11.105.000 | 124 | 11.365.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 12.341.000 | | 18.980.000 | | 19.270.000 | | 19.670.000 | | 20.140.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 12.341.000 | 85 | 18.980.000 | 90 | 19.270.000 | 95 | 19.670.000 | 100 | 20.140.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 12.341.000 | | 12.480.000 | | 12.670.000 | | 12.930.000 | | 13.235.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 12.341.000 | 18 | 12.480.000 | 21 | 12.670.000 | 24 | 12.930.000 | 27 | 13.235.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 12.341.000 | | 12.480.000 | | 12.670.000 | | 12.930.000 | | 13.235.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan | 3 | 4 | 4 | 12.341.000 | 4 | 12.480.000 | 4 | 12.670.000 | 4 | 12.930.000 | 4 | 13.235.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0025 - Puskesmas Maron** | | | | | **6.732.476.702** | | **6.813.755.000** | | **6.915.340.000** | | **7.056.455.000** | | **7.221.640.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 6.043.590.702,00 | | 6.110.675.000,00 | | 6.201.725.000,00 | | 6.328.245.000,00 | | 6.476.330.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 95,85 | 94 | 94 | 6.043.590.702 | 94 | 6.110.675.000 | 94 | 6.201.725.000 | 94 | 6.328.245.000 | 94 | 6.476.330.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 6.043.590.702 | | 6.110.675.000 | | 6.201.725.000 | | 6.328.245.000 | | 6.476.330.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 6.043.590.702 | 4 | 6.110.675.000 | 4 | 6.201.725.000 | 4 | 6.328.245.000 | 5 | 6.476.330.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 6.043.590.702 | | 6.110.675.000 | | 6.201.725.000 | | 6.328.245.000 | | 6.476.330.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 6.043.590.702 | 1 | 6.110.675.000 | 1 | 6.201.725.000 | 1 | 6.328.245.000 | 1 | 6.476.330.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 688.286.000 | | 695.970.000 | | 706.395.000 | | 720.835.000 | | 737.755.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 96.633.800 | 100 | 97.710.000 | 100 | 99.170.000 | 100 | 101.195.000 | 100 | 103.565.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 96.633.800 | | 97.710.000 | | 99.170.000 | | 101.195.000 | | 103.565.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 87,43 | 87,5 | 89,8 | 96.633.800 | 92,1 | 97.710.000 | 94,4 | 99.170.000 | 96,7 | 101.195.000 | 99 | 103.565.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 96.633.800 | | 97.710.000 | | 99.170.000 | | 101.195.000 | | 103.565.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 96.633.800 | 4 | 97.710.000 | 4 | 99.170.000 | 4 | 101.195.000 | 4 | 103.565.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | 365.652.200 | 0 | 369.730.000 | 0 | 375.260.000 | 0 | 382.925.000 | 0 | 391.905.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 7,93 | 7,78 | 7,64 | | 7,49 | | 7,05 | | 6,75 | | 6,46 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 7 | 7 | 7 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 8,54 | 7,69 | 6,92 | | 6,92 | | 6,8 | | 5,04 | | 5,04 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 365.652.200 | | 369.730.000 | | 375.260.000 | | 382.925.000 | | 391.905.000 | |
| Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 84,61 | 85,61 | 86,61 | 129.480.000 | 87,61 | 130.935.000 | 88,61 | 132.905.000 | 89,61 | 135.625.000 | 90,61 | 138.815.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 92,77 | 92,77 | 92,77 | | 92,77 | | 92,77 | | 92,77 | | 92,77 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 26.000.000 | | 26.290.000 | | 26.685.000 | | 27.230.000 | | 27.870.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 644 | 627 | 727 | 26.000.000 | 722 | 26.290.000 | 717 | 26.685.000 | 712 | 27.230.000 | 707 | 27.870.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 10.400.000 | | 10.520.000 | | 10.680.000 | | 10.900.000 | | 11.160.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 727 | 745 | 727 | 10.400.000 | 722 | 10.520.000 | 717 | 10.680.000 | 712 | 10.900.000 | 707 | 11.160.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 5.200.000 | | 5.260.000 | | 5.340.000 | | 5.450.000 | | 5.580.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 719 | 743 | 719 | 5.200.000 | 714 | 5.260.000 | 709 | 5.340.000 | 704 | 5.450.000 | 699 | 5.580.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 63.180.000 | | 63.885.000 | | 64.840.000 | | 66.165.000 | | 67.715.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.157 | 3.012 | 3.227 | 63.180.000 | 3.208 | 63.885.000 | 3.189 | 64.840.000 | 3.170 | 66.165.000 | 3.151 | 67.715.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 12.400.000 | | 12.540.000 | | 12.730.000 | | 12.990.000 | | 13.295.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7.739 | 7.381 | 7.739 | 12.400.000 | 7.765 | 12.540.000 | 7.791 | 12.730.000 | 7.817 | 12.990.000 | 7.843 | 13.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 12.300.000 | | 12.440.000 | | 12.630.000 | | 12.890.000 | | 13.195.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 12.300.000 | 4 | 12.440.000 | 4 | 12.630.000 | 4 | 12.890.000 | 4 | 13.195.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 88,64 | 90,14 | 91,64 | 236.172.200 | 93,14 | 238.795.000 | 93,19 | 242.355.000 | 93,24 | 247.300.000 | 93,29 | 253.090.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 236.172.200 | | 238.795.000 | | 242.355.000 | | 247.300.000 | | 253.090.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 236.172.200 | 12 | 238.795.000 | 12 | 242.355.000 | 12 | 247.300.000 | 12 | 253.090.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 117 | 95 | 96 | 195.800.000 | 97 | 197.990.000 | 98 | 200.960.000 | 99 | 205.070.000 | 100 | 209.890.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,093 | 0,050 | 0,050 | | 0,045 | | 0,044 | | 0,044 | | 0,043 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0,02 | 0,01 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 15,40 | 27,83 | 40,27 | | 52,70 | | 65,13 | | 77,57 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 53,85 | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 195.800.000 | | 197.990.000 | | 200.960.000 | | 205.070.000 | | 209.890.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 2,26 | 1 | 1 | 104.362.000 | 1 | 105.535.000 | 1 | 107.125.000 | 1 | 109.320.000 | 1 | 111.895.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 10.000.000 | | 10.115.000 | | 10.270.000 | | 10.480.000 | | 10.730.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 888 | 840 | 567 | 10.000.000 | 501 | 10.115.000 | 450 | 10.270.000 | 411 | 10.480.000 | 382 | 10.730.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 400.000 | | 405.000 | | 415.000 | | 425.000 | | 435.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1.026 | 967 | 1.010 | 400.000 | 1.024 | 405.000 | 1.030 | 415.000 | 1.036 | 425.000 | 1.041 | 435.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 91.062.000 | | 92.075.000 | | 93.450.000 | | 95.360.000 | | 97.590.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 91.062.000 | 12 | 92.075.000 | 12 | 93.450.000 | 12 | 95.360.000 | 12 | 97.590.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 2.500.000 | | 2.530.000 | | 2.570.000 | | 2.625.000 | | 2.690.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 132 | 2.500.000 | 113 | 2.530.000 | 100 | 2.570.000 | 90 | 2.625.000 | 82 | 2.690.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 200.000 | | 205.000 | | 210.000 | | 215.000 | | 225.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 37 | 200.000 | 41 | 205.000 | 50 | 210.000 | 58 | 215.000 | 66 | 225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 200.000 | | 205.000 | | 210.000 | | 215.000 | | 225.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 200.000 | 8 | 205.000 | 8 | 210.000 | 8 | 215.000 | 8 | 225.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 83,44 | 95 | 95 | 87.438.000 | 95 | 88.410.000 | 95 | 89.725.000 | 95 | 91.555.000 | 95 | 93.700.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 77.320.000 | | 78.180.000 | | 79.345.000 | | 80.965.000 | | 82.860.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 77.320.000 | 12 | 78.180.000 | 12 | 79.345.000 | 12 | 80.965.000 | 12 | 82.860.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 10.118.000 | | 10.230.000 | | 10.380.000 | | 10.590.000 | | 10.840.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 10.118.000 | 12 | 10.230.000 | 12 | 10.380.000 | 12 | 10.590.000 | 12 | 10.840.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 12.117 | 12.167 | 12.217 | 4.000.000 | 12.267 | 4.045.000 | 12.317 | 4.110.000 | 12.367 | 4.195.000 | 12.417 | 4.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 4.000.000 | | 4.045.000 | | 4.110.000 | | 4.195.000 | | 4.295.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.045.000 | 12 | 4.110.000 | 12 | 4.195.000 | 12 | 4.295.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 30.200.000 | 30 | 30.540.000 | 35 | 31.005.000 | 40 | 31.645.000 | 45 | 32.395.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 110,26 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 30.200.000 | | 30.540.000 | | 31.005.000 | | 31.645.000 | | 32.395.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 86 | 100 | 100 | 30.200.000 | 100 | 30.540.000 | 100 | 31.005.000 | 100 | 31.645.000 | 100 | 32.395.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 44,21 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 15.600.000 | | 15.775.000 | | 16.015.000 | | 16.345.000 | | 16.730.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 31.598 | 27.467 | 34.274 | 15.600.000 | 34.247 | 15.775.000 | 34.220 | 16.015.000 | 34.193 | 16.345.000 | 34.166 | 16.730.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 2.600.000 | | 2.630.000 | | 2.670.000 | | 2.725.000 | | 2.790.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7.470 | 6.580 | 7.902 | 2.600.000 | 8.021 | 2.630.000 | 8.141 | 2.670.000 | 8.263 | 2.725.000 | 8.387 | 2.790.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.600.000 | | 2.630.000 | | 2.670.000 | | 2.725.000 | | 2.790.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.401 | 5.413 | 5.414 | 2.600.000 | 5.415 | 2.630.000 | 5.417 | 2.670.000 | 5.418 | 2.725.000 | 5.419 | 2.790.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 1.800.000 | | 1.820.000 | | 1.850.000 | | 1.890.000 | | 1.935.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 770 | 1.196 | 1.197 | 1.800.000 | 1.198 | 1.820.000 | 1.200 | 1.850.000 | 1.201 | 1.890.000 | 1.202 | 1.935.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 7.600.000 | | 7.685.000 | | 7.800.000 | | 7.960.000 | | 8.150.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 130 | 130 | 130 | 7.600.000 | 133 | 7.685.000 | 136 | 7.800.000 | 139 | 7.960.000 | 142 | 8.150.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 600.000 | | 7.110.000 | | 7.220.000 | | 7.375.000 | | 7.555.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 7,9 | 75 | 80 | 600.000 | 85 | 7.110.000 | 90 | 7.220.000 | 95 | 7.375.000 | 100 | 7.555.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 600.000 | | 610.000 | | 620.000 | | 635.000 | | 650.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 600.000 | 18 | 610.000 | 21 | 620.000 | 24 | 635.000 | 27 | 650.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 600.000 | | 610.000 | | 620.000 | | 635.000 | | 650.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 600.000 | 4 | 610.000 | 4 | 620.000 | 4 | 635.000 | 4 | 650.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0026 - Puskesmas Suko** | | | | | **1.483.091.182** | | **1.506.115.000** | | **1.528.645.000** | | **1.559.905.000** | | **1.596.460.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 1.118.284.182,00 | | 1.130.700.000,00 | | 1.147.550.000,00 | | 1.170.965.000,00 | | 1.198.370.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 94,71 | 94 | 94 | 1.118.284.182 | 94 | 1.130.700.000 | 94 | 1.147.550.000 | 94 | 1.170.965.000 | 94 | 1.198.370.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 1.118.284.182 | | 1.130.700.000 | | 1.147.550.000 | | 1.170.965.000 | | 1.198.370.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 1.118.284.182 | 4 | 1.130.700.000 | 4 | 1.147.550.000 | 4 | 1.170.965.000 | 5 | 1.198.370.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 1.118.284.182 | | 1.130.700.000 | | 1.147.550.000 | | 1.170.965.000 | | 1.198.370.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 1.118.284.182 | 1 | 1.130.700.000 | 1 | 1.147.550.000 | 1 | 1.170.965.000 | 1 | 1.198.370.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 359.007.000 | | 363.050.000 | | 368.540.000 | | 376.120.000 | | 384.960.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 62.847.000 | 100 | 63.545.000 | 100 | 64.495.000 | 100 | 65.815.000 | 100 | 67.360.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 62.847.000 | | 63.545.000 | | 64.495.000 | | 65.815.000 | | 67.360.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 98,04 | 98,1 | 98,28 | 62.847.000 | 98,46 | 63.545.000 | 98,64 | 64.495.000 | 98,82 | 65.815.000 | 99 | 67.360.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 62.847.000 | | 63.545.000 | | 64.495.000 | | 65.815.000 | | 67.360.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 62.847.000 | 4 | 63.545.000 | 4 | 64.495.000 | 4 | 65.815.000 | 4 | 67.360.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | 186.240.000 | 0 | 188.330.000 | 0 | 191.160.000 | 0 | 195.080.000 | 0 | 199.665.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 10,58 | 10,26 | 9,94 | | 9,62 | | 9,29 | | 8,33 | | 8,01 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 13,83 | 12,45 | 12,45 | | 12,45 | | 11,45 | | 10,17 | | 9,17 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 186.240.000 | | 188.330.000 | | 191.160.000 | | 195.080.000 | | 199.665.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 78,70 | 80,70 | 82,70 | 84.100.000 | 84,70 | 85.055.000 | 86,70 | 86.345.000 | 88,70 | 88.125.000 | 90,70 | 90.205.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 91 | 91,3 | 91,6 | | 91,9 | | 92,2 | | 92,5 | | 92,8 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 45.500.000 | | 46.010.000 | | 46.700.000 | | 47.655.000 | | 48.775.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 170 | 169 | 191 | 45.500.000 | 190 | 46.010.000 | 189 | 46.700.000 | 188 | 47.655.000 | 187 | 48.775.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 190 | 205 | 191 | 2.400.000 | 190 | 2.430.000 | 189 | 2.470.000 | 188 | 2.525.000 | 187 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 192 | 199 | 192 | 2.000.000 | 191 | 2.025.000 | 190 | 2.060.000 | 189 | 2.105.000 | 188 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.500.000 | | 1.520.000 | | 1.545.000 | | 1.580.000 | | 1.620.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 793 | 761 | 806 | 1.500.000 | 801 | 1.520.000 | 796 | 1.545.000 | 791 | 1.580.000 | 786 | 1.620.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 29.000.000 | | 29.325.000 | | 29.765.000 | | 30.375.000 | | 31.090.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan | 1.642 | 1.665 | 1.890 | 29.000.000 | 1.896 | 29.325.000 | 1.902 | 29.765.000 | 1.908 | 30.375.000 | 1.914 | 31.090.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 3.700.000 | | 3.745.000 | | 3.805.000 | | 3.885.000 | | 3.980.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 3.700.000 | 4 | 3.745.000 | 4 | 3.805.000 | 4 | 3.885.000 | 4 | 3.980.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 90,37 | 90,87 | 91,37 | 102.140.000 | 91,87 | 103.275.000 | 93,37 | 104.815.000 | 93,87 | 106.955.000 | 94,37 | 109.460.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 102.140.000 | | 103.275.000 | | 104.815.000 | | 106.955.000 | | 109.460.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 102.140.000 | 12 | 103.275.000 | 12 | 104.815.000 | 12 | 106.955.000 | 12 | 109.460.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 129 | 95 | 96 | 97.920.000 | 97 | 99.030.000 | 98 | 100.535.000 | 99 | 102.610.000 | 100 | 105.020.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,000 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 0 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 0 | 15 | 30 | | 45 | | 60 | | 75 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | | | | | 97.920.000 | | 99.030.000 | | 100.535.000 | | 102.610.000 | | 105.020.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 2,01 | 1 | 1 | 78.588.000 | 1 | 79.475.000 | 1 | 80.685.000 | 1 | 82.350.000 | 1 | 84.280.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 11.000.000 | | 11.125.000 | | 11.295.000 | | 11.530.000 | | 11.800.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 179 | 183 | 123 | 11.000.000 | 109 | 11.125.000 | 98 | 11.295.000 | 90 | 11.530.000 | 83 | 11.800.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 289 | 262 | 274 | 1.000.000 | 277 | 1.015.000 | 279 | 1.035.000 | 281 | 1.060.000 | 282 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 60.588.000 | | 61.260.000 | | 62.175.000 | | 63.445.000 | | 64.930.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 60.588.000 | 12 | 61.260.000 | 12 | 62.175.000 | 12 | 63.445.000 | 12 | 64.930.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 34 | 2.000.000 | 29 | 2.025.000 | 26 | 2.060.000 | 23 | 2.105.000 | 21 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 5 | 2.000.000 | 6 | 2.025.000 | 7 | 2.060.000 | 8 | 2.105.000 | 9 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 2.000.000 | 8 | 2.025.000 | 8 | 2.060.000 | 8 | 2.105.000 | 8 | 2.155.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 89,06 | 95 | 95 | 10.732.000 | 95 | 10.855.000 | 95 | 11.020.000 | 95 | 11.245.000 | 95 | 11.510.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 4.000.000 | | 4.045.000 | | 4.110.000 | | 4.195.000 | | 4.295.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.045.000 | 12 | 4.110.000 | 12 | 4.195.000 | 12 | 4.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 6.732.000 | | 6.810.000 | | 6.910.000 | | 7.050.000 | | 7.215.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 6.732.000 | 12 | 6.810.000 | 12 | 6.910.000 | 12 | 7.050.000 | 12 | 7.215.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 1.950 | 1.962 | 1.974 | 8.600.000 | 1.986 | 8.700.000 | 1.998 | 8.830.000 | 2.010 | 9.015.000 | 2.022 | 9.230.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 8.600.000 | | 8.700.000 | | 8.830.000 | | 9.015.000 | | 9.230.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan | 4 | 12 | 12 | 8.600.000 | 12 | 8.700.000 | 12 | 8.830.000 | 12 | 9.015.000 | 12 | 9.230.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 12.000.000 | 30 | 12.145.000 | 35 | 12.350.000 | 40 | 12.615.000 | 45 | 12.915.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 86,93 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 12.000.000 | | 12.145.000 | | 12.350.000 | | 12.615.000 | | 12.915.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 96 | 100 | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.145.000 | 100 | 12.350.000 | 100 | 12.615.000 | 100 | 12.915.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 37,27 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.487 | 1.665 | 8.840 | 2.000.000 | 8.833 | 2.025.000 | 8.826 | 2.060.000 | 8.819 | 2.105.000 | 8.812 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.920 | 2.120 | 2.276 | 2.000.000 | 2.310 | 2.025.000 | 2.345 | 2.060.000 | 2.380 | 2.105.000 | 2.416 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 976 | 923 | 923 | 2.000.000 | 923 | 2.025.000 | 924 | 2.060.000 | 924 | 2.105.000 | 924 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 291 | 373 | 373 | 2.000.000 | 374 | 2.025.000 | 374 | 2.060.000 | 374 | 2.105.000 | 375 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 4.000.000 | | 4.045.000 | | 4.110.000 | | 4.195.000 | | 4.295.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 51 | 51 | 51 | 4.000.000 | 52 | 4.045.000 | 53 | 4.110.000 | 54 | 4.195.000 | 55 | 4.295.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 5.800.000 | | 12.365.000 | | 12.555.000 | | 12.820.000 | | 13.130.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 5.800.000 | 85 | 12.365.000 | 90 | 12.555.000 | 95 | 12.820.000 | 100 | 13.130.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 5.800.000 | | 5.865.000 | | 5.955.000 | | 6.080.000 | | 6.225.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 5.800.000 | 18 | 5.865.000 | 21 | 5.955.000 | 24 | 6.080.000 | 27 | 6.225.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan | | | | | 5.800.000 | | 5.865.000 | | 5.955.000 | | 6.080.000 | | 6.225.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 5.800.000 | 4 | 5.865.000 | 4 | 5.955.000 | 4 | 6.080.000 | 4 | 6.225.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0027 - Puskesmas Gending** | | | | | **5.317.465.411** | | **5.383.035.000** | | **5.463.300.000** | | **5.574.805.000** | | **5.705.320.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.734.178.121,00 | | 4.786.730.000,00 | | 4.858.055.000,00 | | 4.957.160.000,00 | | 5.073.160.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 95,32 | 94 | 94 | 4.734.178.121 | 94 | 4.786.730.000 | 94 | 4.858.055.000 | 94 | 4.957.160.000 | 94 | 5.073.160.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 4.734.178.121 | | 4.786.730.000 | | 4.858.055.000 | | 4.957.160.000 | | 5.073.160.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 4.734.178.121 | 4 | 4.786.730.000 | 4 | 4.858.055.000 | 4 | 4.957.160.000 | 5 | 5.073.160.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 4.734.178.121 | | 4.786.730.000 | | 4.858.055.000 | | 4.957.160.000 | | 5.073.160.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 4.734.178.121 | 1 | 4.786.730.000 | 1 | 4.858.055.000 | 1 | 4.957.160.000 | 1 | 5.073.160.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 563.092.730 | | 569.385.000 | | 577.920.000 | | 589.755.000 | | 603.610.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 106.753.930 | 100 | 107.940.000 | 100 | 109.550.000 | 100 | 111.785.000 | 100 | 114.405.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 106.753.930 | | 107.940.000 | | 109.550.000 | | 111.785.000 | | 114.405.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 96,51 | 96,6 | 97,08 | 106.753.930 | 97,56 | 107.940.000 | 98,04 | 109.550.000 | 98,52 | 111.785.000 | 99 | 114.405.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 106.753.930 | | 107.940.000 | | 109.550.000 | | 111.785.000 | | 114.405.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 106.753.930 | 4 | 107.940.000 | 4 | 109.550.000 | 4 | 111.785.000 | 4 | 114.405.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0,9 | 0 | 209.318.800 | 0 | 211.655.000 | 0 | 214.825.000 | 0 | 219.225.000 | 0 | 224.370.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 10,99 | 10,99 | 10,54 | | 10,39 | | 9,79 | | 9,34 | | 9,04 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 3,61 | 3,25 | 2,92 | | 2,63 | | 2,37 | | 2,13 | | 2,13 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 209.318.800 | | 211.655.000 | | 214.825.000 | | 219.225.000 | | 224.370.000 | |
| Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 88,23 | 89,23 | 90,23 | 101.880.000 | 91,23 | 103.020.000 | 92,23 | 104.570.000 | 93,23 | 106.720.000 | 94,23 | 109.230.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 89,53 | 90,03 | 90,53 | | 90,73 | | 90,93 | | 91,13 | | 91,33 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 58.080.000 | | 58.725.000 | | 59.605.000 | | 60.825.000 | | 62.250.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 608 | 643 | 610 | 58.080.000 | 606 | 58.725.000 | 602 | 59.605.000 | 598 | 60.825.000 | 594 | 62.250.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 300.000 | | 305.000 | | 310.000 | | 320.000 | | 330.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 610 | 646 | 610 | 300.000 | 606 | 305.000 | 602 | 310.000 | 598 | 320.000 | 594 | 330.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 607 | 649 | 607 | 1.200.000 | 603 | 1.215.000 | 599 | 1.235.000 | 595 | 1.265.000 | 591 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 5.200.000 | | 5.260.000 | | 5.340.000 | | 5.450.000 | | 5.580.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.624 | 2.607 | 2.782 | 5.200.000 | 2.765 | 5.260.000 | 2.748 | 5.340.000 | 2.732 | 5.450.000 | 2.716 | 5.580.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 33.100.000 | | 33.470.000 | | 33.970.000 | | 34.665.000 | | 35.480.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5.657 | 5.823 | 5.994 | 33.100.000 | 6.014 | 33.470.000 | 6.034 | 33.970.000 | 6.054 | 34.665.000 | 6.074 | 35.480.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 4.000.000 | | 4.045.000 | | 4.110.000 | | 4.195.000 | | 4.295.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.045.000 | 4 | 4.110.000 | 4 | 4.195.000 | 4 | 4.295.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 92,53 | 93,03 | 93,53 | 107.438.800 | 94,03 | 108.635.000 | 95,53 | 110.255.000 | 96,03 | 112.505.000 | 96,53 | 115.140.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 107.438.800 | | 108.635.000 | | 110.255.000 | | 112.505.000 | | 115.140.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 107.438.800 | 12 | 108.635.000 | 12 | 110.255.000 | 12 | 112.505.000 | 12 | 115.140.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 162 | 95 | 96 | 206.400.000 | 97 | 208.705.000 | 98 | 211.835.000 | 99 | 216.170.000 | 100 | 221.250.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,000 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 0 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 38,50 | 47,08 | 55,67 | | 64,25 | | 72,83 | | 81,42 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 53,85 | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 206.400.000 | | 208.705.000 | | 211.835.000 | | 216.170.000 | | 221.250.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,27 | 1 | 1 | 147.130.000 | 1 | 148.775.000 | 1 | 151.010.000 | 1 | 154.105.000 | 1 | 157.730.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 9.000.000 | | 9.100.000 | | 9.240.000 | | 9.430.000 | | 9.655.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 602 | 531 | 358 | 9.000.000 | 316 | 9.100.000 | 285 | 9.240.000 | 260 | 9.430.000 | 242 | 9.655.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 6.000.000 | | 6.070.000 | | 6.165.000 | | 6.295.000 | | 6.445.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 789 | 785 | 820 | 6.000.000 | 831 | 6.070.000 | 836 | 6.165.000 | 841 | 6.295.000 | 845 | 6.445.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 121.230.000 | | 122.580.000 | | 124.410.000 | | 126.950.000 | | 129.925.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 121.230.000 | 12 | 122.580.000 | 12 | 124.410.000 | 12 | 126.950.000 | 12 | 129.925.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 8.000.000 | | 8.090.000 | | 8.215.000 | | 8.385.000 | | 8.585.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 54 | 8.000.000 | 47 | 8.090.000 | 43 | 8.215.000 | 39 | 8.385.000 | 36 | 8.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 2.600.000 | | 2.630.000 | | 2.670.000 | | 2.725.000 | | 2.790.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 31 | 2.600.000 | 34 | 2.630.000 | 41 | 2.670.000 | 48 | 2.725.000 | 55 | 2.790.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 300.000 | | 305.000 | | 310.000 | | 320.000 | | 330.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 300.000 | 8 | 305.000 | 8 | 310.000 | 8 | 320.000 | 8 | 330.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 96,43 | 95 | 95 | 35.870.000 | 95 | 36.270.000 | 95 | 36.810.000 | 95 | 37.560.000 | 95 | 38.440.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 22.400.000 | | 22.650.000 | | 22.990.000 | | 23.460.000 | | 24.010.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 22.400.000 | 12 | 22.650.000 | 12 | 22.990.000 | 12 | 23.460.000 | 12 | 24.010.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 13.470.000 | | 13.620.000 | | 13.820.000 | | 14.100.000 | | 14.430.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 13.470.000 | 12 | 13.620.000 | 12 | 13.820.000 | 12 | 14.100.000 | 12 | 14.430.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 11.343 | 11.403 | 11.463 | 23.400.000 | 11.523 | 23.660.000 | 11.583 | 24.015.000 | 11.643 | 24.505.000 | 11.703 | 25.080.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 23.400.000 | | 23.660.000 | | 24.015.000 | | 24.505.000 | | 25.080.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 23.400.000 | 12 | 23.660.000 | 12 | 24.015.000 | 12 | 24.505.000 | 12 | 25.080.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 40.620.000 | 30 | 41.085.000 | 35 | 41.710.000 | 40 | 42.575.000 | 45 | 43.585.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 56,90 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 40.620.000 | | 41.085.000 | | 41.710.000 | | 42.575.000 | | 43.585.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 96 | 100 | 100 | 40.620.000 | 100 | 41.085.000 | 100 | 41.710.000 | 100 | 42.575.000 | 100 | 43.585.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 32,65 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 20.220.000 | | 20.445.000 | | 20.750.000 | | 21.175.000 | | 21.675.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 26.584 | 24.856 | 27.494 | 20.220.000 | 27.472 | 20.445.000 | 27.450 | 20.750.000 | 27.428 | 21.175.000 | 27.406 | 21.675.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 7.800.000 | | 7.890.000 | | 8.010.000 | | 8.175.000 | | 8.370.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6.164 | 6.409 | 6.256 | 7.800.000 | 6.350 | 7.890.000 | 6.445 | 8.010.000 | 6.542 | 8.175.000 | 6.640 | 8.370.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.030 | 9.487 | 9.489 | 2.000.000 | 9.491 | 2.025.000 | 9.493 | 2.060.000 | 9.496 | 2.105.000 | 9.498 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 728 | 835 | 836 | 2.000.000 | 837 | 2.025.000 | 837 | 2.060.000 | 838 | 2.105.000 | 839 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 8.600.000 | | 8.700.000 | | 8.830.000 | | 9.015.000 | | 9.230.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 69 | 57 | 69 | 8.600.000 | 71 | 8.700.000 | 73 | 8.830.000 | 75 | 9.015.000 | 77 | 9.230.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 20.194.560 | | 26.920.000 | | 27.325.000 | | 27.890.000 | | 28.550.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 100 | 75 | 80 | 20.194.560 | 85 | 26.920.000 | 90 | 27.325.000 | 95 | 27.890.000 | 700 | 28.550.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 20.194.560 | | 20.420.000 | | 20.725.000 | | 21.150.000 | | 21.645.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 20.194.560 | 18 | 20.420.000 | 21 | 20.725.000 | 24 | 21.150.000 | 27 | 21.645.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 20.194.560 | | 20.420.000 | | 20.725.000 | | 21.150.000 | | 21.645.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 20.194.560 | 4 | 20.420.000 | 4 | 20.725.000 | 4 | 21.150.000 | 4 | 21.645.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0028 - Puskesmas Dringu** | | | | | **3.204.485.423** | | **3.246.605.000** | | **3.295.035.000** | | **3.362.315.000** | | **3.441.035.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.553.392.423,00 | | 2.581.740.000,00 | | 2.620.210.000,00 | | 2.673.665.000,00 | | 2.736.230.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 90,32 | 90 | 91 | 2.553.392.423 | 92 | 2.581.740.000 | 93 | 2.620.210.000 | 94 | 2.673.665.000 | 95 | 2.736.230.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.553.392.423 | | 2.581.740.000 | | 2.620.210.000 | | 2.673.665.000 | | 2.736.230.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 2.553.392.423 | 4 | 2.581.740.000 | 4 | 2.620.210.000 | 4 | 2.673.665.000 | 5 | 2.736.230.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.553.392.423 | | 2.581.740.000 | | 2.620.210.000 | | 2.673.665.000 | | 2.736.230.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.553.392.423 | 1 | 2.581.740.000 | 1 | 2.620.210.000 | 1 | 2.673.665.000 | 1 | 2.736.230.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 639.505.000 | | 646.645.000 | | 656.330.000 | | 669.770.000 | | 685.475.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 118.825.000 | 100 | 120.145.000 | 100 | 121.940.000 | 100 | 124.430.000 | 100 | 127.345.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 118.825.000 | | 120.145.000 | | 121.940.000 | | 124.430.000 | | 127.345.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 76,05 | 85 | 87,8 | 118.825.000 | 90,6 | 120.145.000 | 93,4 | 121.940.000 | 96,2 | 124.430.000 | 99 | 127.345.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 118.825.000 | | 120.145.000 | | 121.940.000 | | 124.430.000 | | 127.345.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 118.825.000 | 4 | 120.145.000 | 4 | 121.940.000 | 4 | 124.430.000 | 4 | 127.345.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | 331.180.000 | 0 | 334.870.000 | 0 | 339.875.000 | 0 | 346.835.000 | 0 | 354.960.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 21,23 | 21,23 | 20,78 | | 19,43 | | 18,68 | | 17,79 | | 16,44 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 6 | 6 | 6 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 11,59 | 10,43 | 10,43 | | 10,43 | | 10,43 | | 9,84 | | 8,01 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 331.180.000 | | 334.870.000 | | 339.875.000 | | 346.835.000 | | 354.960.000 | |
| Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 64,74 | 67,74 | 70,74 | 111.900.000 | 73,74 | 113.155.000 | 76,74 | 114.855.000 | 79,74 | 117.220.000 | 82,74 | 119.970.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 88,35 | 88,85 | 89,35 | | 89,85 | | 90,35 | | 90,85 | | 91,35 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 65.800.000 | | 66.535.000 | | 67.530.000 | | 68.910.000 | | 70.525.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 609 | 658 | 651 | 65.800.000 | 646 | 66.535.000 | 641 | 67.530.000 | 637 | 68.910.000 | 633 | 70.525.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 800.000 | | 810.000 | | 825.000 | | 845.000 | | 865.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 651 | 690 | 651 | 800.000 | 646 | 810.000 | 641 | 825.000 | 637 | 845.000 | 633 | 865.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 637 | 657 | 637 | 1.200.000 | 633 | 1.215.000 | 629 | 1.235.000 | 625 | 1.265.000 | 621 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.707 | 2.801 | 2.730 | 1.200.000 | 2.714 | 1.215.000 | 2.698 | 1.235.000 | 2.682 | 1.265.000 | 2.666 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 39.300.000 | | 39.740.000 | | 40.335.000 | | 41.160.000 | | 42.125.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6.653 | 5.179 | 7.216 | 39.300.000 | 7.240 | 39.740.000 | 7.264 | 40.335.000 | 7.288 | 41.160.000 | 7.312 | 42.125.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 3.600.000 | | 3.640.000 | | 3.695.000 | | 3.775.000 | | 3.865.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.640.000 | 4 | 3.695.000 | 4 | 3.775.000 | 4 | 3.865.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 85,83 | 87,33 | 88,83 | 219.280.000 | 90,33 | 221.715.000 | 90,38 | 225.020.000 | 90,43 | 229.615.000 | 90,48 | 234.990.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 219.280.000 | | 221.715.000 | | 225.020.000 | | 229.615.000 | | 234.990.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 219.280.000 | 12 | 221.715.000 | 12 | 225.020.000 | 12 | 229.615.000 | 12 | 234.990.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 180 | 95 | 96 | 160.700.000 | 97 | 162.495.000 | 98 | 164.930.000 | 99 | 168.310.000 | 100 | 172.260.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,018 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 28,60 | 38,83 | 49,07 | | 59,30 | | 69,53 | | 79,77 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 160.700.000 | | 162.495.000 | | 164.930.000 | | 168.310.000 | | 172.260.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,01 | 1 | 1 | 117.920.000 | 1 | 119.240.000 | 1 | 121.025.000 | 1 | 123.505.000 | 1 | 126.400.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 11.200.000 | | 11.325.000 | | 11.495.000 | | 11.730.000 | | 12.005.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 767 | 685 | 462 | 11.200.000 | 408 | 11.325.000 | 367 | 11.495.000 | 335 | 11.730.000 | 312 | 12.005.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 800.000 | | 810.000 | | 825.000 | | 845.000 | | 865.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 558 | 411 | 429 | 800.000 | 435 | 810.000 | 438 | 825.000 | 440 | 845.000 | 443 | 865.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 102.420.000 | | 103.560.000 | | 105.100.000 | | 107.245.000 | | 109.755.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 102.420.000 | 12 | 103.560.000 | 12 | 105.100.000 | 12 | 107.245.000 | 12 | 109.755.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 700.000 | | 710.000 | | 725.000 | | 740.000 | | 760.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 46 | 700.000 | 40 | 710.000 | 36 | 725.000 | 33 | 740.000 | 31 | 760.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 2.200.000 | | 2.225.000 | | 2.260.000 | | 2.310.000 | | 2.365.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 47 | 2.200.000 | 52 | 2.225.000 | 63 | 2.260.000 | 73 | 2.310.000 | 83 | 2.365.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 600.000 | | 610.000 | | 620.000 | | 635.000 | | 650.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 600.000 | 8 | 610.000 | 8 | 620.000 | 8 | 635.000 | 8 | 650.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 90,00 | 95 | 95 | 23.980.000 | 95 | 24.245.000 | 95 | 24.610.000 | 95 | 25.115.000 | 95 | 25.705.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 12.600.000 | | 12.740.000 | | 12.930.000 | | 13.195.000 | | 13.505.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 12.600.000 | 12 | 12.740.000 | 12 | 12.930.000 | 12 | 13.195.000 | 12 | 13.505.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 11.380.000 | | 11.505.000 | | 11.680.000 | | 11.920.000 | | 12.200.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 11.380.000 | 12 | 11.505.000 | 12 | 11.680.000 | 12 | 11.920.000 | 12 | 12.200.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 12.682 | 12.752 | 12.822 | 18.800.000 | 12.892 | 19.010.000 | 12.962 | 19.295.000 | 13.032 | 19.690.000 | 13.102 | 20.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 18.800.000 | | 19.010.000 | | 19.295.000 | | 19.690.000 | | 20.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 18.800.000 | 12 | 19.010.000 | 12 | 19.295.000 | 12 | 19.690.000 | 12 | 20.155.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 28.800.000 | 30 | 29.135.000 | 35 | 29.585.000 | 40 | 30.195.000 | 45 | 30.910.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 59,13 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 28.800.000 | | 29.135.000 | | 29.585.000 | | 30.195.000 | | 30.910.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 93,2 | 100 | 100 | 28.800.000 | 100 | 29.135.000 | 100 | 29.585.000 | 100 | 30.195.000 | 100 | 30.910.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 120,06 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 6.400.000 | | 6.475.000 | | 6.575.000 | | 6.710.000 | | 6.870.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 34.154 | 15.899 | 35.104 | 6.400.000 | 35.076 | 6.475.000 | 35.048 | 6.575.000 | 35.020 | 6.710.000 | 34.992 | 6.870.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 8.400.000 | | 8.495.000 | | 8.625.000 | | 8.805.000 | | 9.015.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7.618 | 7.552 | 7.732 | 8.400.000 | 7.848 | 8.495.000 | 7.966 | 8.625.000 | 8.085 | 8.805.000 | 8.206 | 9.015.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 1.400.000 | | 1.420.000 | | 1.445.000 | | 1.475.000 | | 1.510.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.723 | 5.758 | 5.759 | 1.400.000 | 5.761 | 1.420.000 | 5.762 | 1.445.000 | 5.763 | 1.475.000 | 5.765 | 1.510.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 1.400.000 | | 1.420.000 | | 1.445.000 | | 1.475.000 | | 1.510.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 889 | 1048 | 1.049 | 1.400.000 | 1.050 | 1.420.000 | 1.051 | 1.445.000 | 1.052 | 1.475.000 | 1.053 | 1.510.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 11.200.000 | | 11.325.000 | | 11.495.000 | | 11.730.000 | | 12.005.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 65 | 59 | 70 | 11.200.000 | 72 | 11.325.000 | 74 | 11.495.000 | 76 | 11.730.000 | 78 | 12.005.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN | | | | | 11.588.000 | | 18.220.000 | | 18.495.000 | | 18.880.000 | | 19.330.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 10,6 | 75 | 80 | 11.588.000 | 85 | 18.220.000 | 90 | 18.495.000 | 95 | 18.880.000 | 100 | 19.330.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya | | | | | 11.588.000 | | 11.720.000 | | 11.895.000 | | 12.140.000 | | 12.425.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 11.588.000 | 18 | 11.720.000 | 21 | 11.895.000 | 24 | 12.140.000 | 27 | 12.425.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 11.588.000 | | 11.720.000 | | 11.895.000 | | 12.140.000 | | 12.425.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 11.588.000 | 4 | 11.720.000 | 4 | 11.895.000 | 4 | 12.140.000 | 4 | 12.425.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0029 - Puskesmas Wonomerto** | | | | | **3.791.318.050** | | **3.839.955.000** | | **3.897.245.000** | | **3.976.825.000** | | **4.069.935.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.291.868.150,00 | | 3.328.410.000,00 | | 3.378.005.000,00 | | 3.446.920.000,00 | | 3.527.580.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 88,07 | 90 | 90 | 3.291.868.150 | 90 | 3.328.410.000 | 90 | 3.378.005.000 | 90 | 3.446.920.000 | 90 | 3.527.580.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 3.291.868.150 | | 3.328.410.000 | | 3.378.005.000 | | 3.446.920.000 | | 3.527.580.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 4 | 4 | 4 | 3.291.868.150 | 4 | 3.328.410.000 | 4 | 3.378.005.000 | 4 | 3.446.920.000 | 4 | 3.527.580.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 3.291.868.150 | | 3.328.410.000 | | 3.378.005.000 | | 3.446.920.000 | | 3.527.580.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 3.291.868.150 | 1 | 3.328.410.000 | 1 | 3.378.005.000 | 1 | 3.446.920.000 | 1 | 3.527.580.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN | | | | | 486.269.900 | | 491.715.000 | | 499.110.000 | | 509.355.000 | | 521.315.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 74.139.000 | 100 | 74.965.000 | 100 | 76.085.000 | 100 | 77.640.000 | 100 | 79.460.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 74.139.000 | | 74.965.000 | | 76.085.000 | | 77.640.000 | | 79.460.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 89,61 | 89,7 | 91,56 | 74.139.000 | 93,42 | 74.965.000 | 95,28 | 76.085.000 | 97,14 | 77.640.000 | 99 | 79.460.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 74.139.000 | | 74.965.000 | | 76.085.000 | | 77.640.000 | | 79.460.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 74.139.000 | 4 | 74.965.000 | 4 | 76.085.000 | 4 | 77.640.000 | 4 | 79.460.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0,9 | 0 | 208.765.800 | 0 | 211.100.000 | 0 | 214.270.000 | 0 | 218.660.000 | 0 | 223.785.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 9,71 | 9,71 | 9,37 | | 9,2 | | 8,86 | | 8,69 | | 8,35 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 10 | 10 | 9 | | 8 | | 8 | | 8 | | 7 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 3,32 | 2,99 | 2,69 | | 2,69 | | 2,18 | | 1,96 | | 1,76 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 208.765.800 | | 211.100.000 | | 214.270.000 | | 218.660.000 | | 223.785.000 | |
| Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 61,94 | 64,94 | 67,94 | 86.960.000 | 70,94 | 87.940.000 | 73,94 | 89.270.000 | 76,94 | 91.110.000 | 79,94 | 93.250.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 85,88 | 86,38 | 86,88 | | 87,38 | | 88,28 | | 89,18 | | 90,08 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 50.160.000 | | 50.720.000 | | 51.480.000 | | 52.535.000 | | 53.765.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 631 | 525 | 631 | 50.160.000 | 627 | 50.720.000 | 623 | 51.480.000 | 619 | 52.535.000 | 615 | 53.765.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 601 | 578 | 631 | 2.400.000 | 627 | 2.430.000 | 623 | 2.470.000 | 619 | 2.525.000 | 615 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 529 | 580 | 529 | 2.000.000 | 525 | 2.025.000 | 521 | 2.060.000 | 517 | 2.105.000 | 513 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 2.200.000 | | 2.225.000 | | 2.260.000 | | 2.310.000 | | 2.365.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.517 | 2.543 | 2.517 | 2.200.000 | 2.502 | 2.225.000 | 2.487 | 2.260.000 | 2.472 | 2.310.000 | 2.457 | 2.365.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 23.100.000 | | 23.360.000 | | 23.710.000 | | 24.195.000 | | 24.765.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.621 | 4.545 | 5.031 | 23.100.000 | 5.048 | 23.360.000 | 5.065 | 23.710.000 | 5.082 | 24.195.000 | 5.099 | 24.765.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 7.100.000 | | 7.180.000 | | 7.290.000 | | 7.440.000 | | 7.615.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 7.100.000 | 4 | 7.180.000 | 4 | 7.290.000 | 4 | 7.440.000 | 4 | 7.615.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 86,66 | 88,16 | 89,66 | 121.805.800 | 91,16 | 123.160.000 | 91,21 | 125.000.000 | 91,26 | 127.550.000 | 91,31 | 130.535.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 121.805.800 | | 123.160.000 | | 125.000.000 | | 127.550.000 | | 130.535.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 121.805.800 | 12 | 123.160.000 | 12 | 125.000.000 | 12 | 127.550.000 | 12 | 130.535.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 166 | 95 | 96 | 159.425.100 | 97 | 161.210.000 | 98 | 163.640.000 | 99 | 167.000.000 | 100 | 170.925.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,047 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0,02 | 0,01 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 50 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 36,40 | 45,33 | 54,27 | | 63,20 | | 72,13 | | 81,07 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 159.425.100 | | 161.210.000 | | 163.640.000 | | 167.000.000 | | 170.925.000 | |
| | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,59 | 1 | 1 | 133.945.100 | 1 | 135.445.000 | 1 | 137.480.000 | 1 | 140.300.000 | 1 | 143.595.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 50 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 7.400.000 | | 7.485.000 | | 7.600.000 | | 7.760.000 | | 7.945.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 556 | 538 | 363 | 7.400.000 | 321 | 7.485.000 | 288 | 7.600.000 | 263 | 7.760.000 | 245 | 7.945.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 417 | 336 | 351 | 3.000.000 | 356 | 3.035.000 | 358 | 3.085.000 | 360 | 3.150.000 | 362 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 102.420.000 | | 103.560.000 | | 105.100.000 | | 107.245.000 | | 109.755.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 102.420.000 | 12 | 103.560.000 | 12 | 105.100.000 | 12 | 107.245.000 | 12 | 109.755.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 4.400.000 | | 4.450.000 | | 4.520.000 | | 4.615.000 | | 4.725.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 103 | 4.400.000 | 89 | 4.450.000 | 78 | 4.520.000 | 70 | 4.615.000 | 64 | 4.725.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 700.000 | | 710.000 | | 725.000 | | 740.000 | | 760.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 33 | 700.000 | 36 | 710.000 | 44 | 725.000 | 51 | 740.000 | 58 | 760.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 16.025.100 | | 16.205.000 | | 16.450.000 | | 16.790.000 | | 17.185.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 16.025.100 | 8 | 16.205.000 | 8 | 16.450.000 | 8 | 16.790.000 | 8 | 17.185.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 93,01 | 95 | 95 | 13.380.000 | 95 | 13.530.000 | 95 | 13.740.000 | 95 | 14.025.000 | 95 | 14.355.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.025.000 | 12 | 2.060.000 | 12 | 2.105.000 | 12 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 11.380.000 | | 11.505.000 | | 11.680.000 | | 11.920.000 | | 12.200.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 11.380.000 | 12 | 11.505.000 | 12 | 11.680.000 | 12 | 11.920.000 | 12 | 12.200.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 6.862 | 6.892 | 6.922 | 12.100.000 | 6.952 | 12.235.000 | 6.982 | 12.420.000 | 7.012 | 12.675.000 | 7.042 | 12.975.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 12.100.000 | | 12.235.000 | | 12.420.000 | | 12.675.000 | | 12.975.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 12.100.000 | 12 | 12.235.000 | 12 | 12.420.000 | 12 | 12.675.000 | 12 | 12.975.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 43.940.000 | 30 | 44.440.000 | 35 | 45.115.000 | 40 | 46.055.000 | 45 | 47.145.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 67,50 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 43.940.000 | | 44.440.000 | | 45.115.000 | | 46.055.000 | | 47.145.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 70,4 | 100 | 100 | 43.940.000 | 100 | 44.440.000 | 100 | 45.115.000 | 100 | 46.055.000 | 100 | 47.145.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 24,49 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 12.940.000 | | 13.085.000 | | 13.280.000 | | 13.555.000 | | 13.875.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 15.878 | 13.495 | 27.606 | 12.940.000 | 27.584 | 13.085.000 | 27.562 | 13.280.000 | 27.540 | 13.555.000 | 27.518 | 13.875.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 9.800.000 | | 9.910.000 | | 10.060.000 | | 10.270.000 | | 10.515.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5.584 | 5.841 | 6.463 | 9.800.000 | 6.560 | 9.910.000 | 6.658 | 10.060.000 | 6.758 | 10.270.000 | 6.859 | 10.515.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.164 | 1.538 | 1.538 | 2.000.000 | 1.539 | 2.025.000 | 1.539 | 2.060.000 | 1.539 | 2.105.000 | 1.540 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 708 | 756 | 757 | 2.000.000 | 757 | 2.025.000 | 758 | 2.060.000 | 759 | 2.105.000 | 760 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 17.200.000 | | 17.395.000 | | 17.655.000 | | 18.020.000 | | 18.445.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 71 | 61 | 76 | 17.200.000 | 78 | 17.395.000 | 80 | 17.655.000 | 82 | 18.020.000 | 84 | 18.445.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 13.180.000 | | 19.830.000 | | 20.130.000 | | 20.550.000 | | 21.040.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 100 | 75 | 80 | 13.180.000 | 85 | 19.830.000 | 90 | 20.130.000 | 95 | 20.550.000 | 100\ | 21.040.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 13.180.000 | | 13.330.000 | | 13.530.000 | | 13.810.000 | | 14.135.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 13.180.000 | 18 | 13.330.000 | 21 | 13.530.000 | 24 | 13.810.000 | 27 | 14.135.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 13.180.000 | | 13.330.000 | | 13.530.000 | | 13.810.000 | | 14.135.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan | 3 | 0 | 4 | 13.180.000 | 4 | 13.330.000 | 4 | 13.530.000 | 4 | 13.810.000 | 4 | 14.135.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0030 - Puskesmas Lumbang** | | | | | **3.332.713.938** | | **3.376.265.000** | | **3.426.655.000** | | **3.496.630.000** | | **3.578.510.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.895.328.938,00 | | 2.927.470.000,00 | | 2.971.090.000,00 | | 3.031.705.000,00 | | 3.102.650.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 92,32 | 92 | 92 | 2.895.328.938 | 92 | 2.927.470.000 | 93 | 2.971.090.000 | 93 | 3.031.705.000 | 94 | 3.102.650.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.895.328.938 | | 2.927.470.000 | | 2.971.090.000 | | 3.031.705.000 | | 3.102.650.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 2.895.328.938 | 4 | 2.927.470.000 | 4 | 2.971.090.000 | 4 | 3.031.705.000 | 5 | 3.102.650.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.895.328.938 | | 2.927.470.000 | | 2.971.090.000 | | 3.031.705.000 | | 3.102.650.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.895.328.938 | 1 | 2.927.470.000 | 1 | 2.971.090.000 | 1 | 3.031.705.000 | 1 | 3.102.650.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 420.985.000 | | 425.710.000 | | 432.130.000 | | 441.005.000 | | 451.370.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 98.423.000 | 100 | 99.520.000 | 100 | 101.005.000 | 100 | 103.070.000 | 100 | 105.485.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 98.423.000 | | 99.520.000 | | 101.005.000 | | 103.070.000 | | 105.485.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 92,46 | 92,5 | 93,8 | 98.423.000 | 95,1 | 99.520.000 | 96,4 | 101.005.000 | 97,7 | 103.070.000 | 99 | 105.485.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 98.423.000 | | 99.520.000 | | 101.005.000 | | 103.070.000 | | 105.485.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | | 4 | 98.423.000 | 4 | 99.520.000 | 4 | 101.005.000 | 4 | 103.070.000 | 4 | 105.485.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 223.162.000 | 0,8 | 225.660.000 | 0,75 | 229.050.000 | 0,7 | 233.740.000 | 0,7 | 239.225.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 1,96 | 1,96 | 1,47 | | 1,23 | | 0,98 | | 0,74 | | 0,49 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 3 | 3 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 4,51 | 4,06 | 4,06 | | 3,29 | | 2,96 | | 2,66 | | 2,66 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 223.162.000 | | 225.660.000 | | 229.050.000 | | 233.740.000 | | 239.225.000 | |
| Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 76,07 | 78,07 | 80,07 | 116.500.000 | 82,07 | 117.810.000 | 84,07 | 119.590.000 | 86,07 | 122.045.000 | 88,07 | 124.915.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 83,22 | 83,72 | 84,22 | | 84,72 | | 85,62 | | 86,52 | | 87,42 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 58.200.000 | | 58.850.000 | | 59.730.000 | | 60.950.000 | | 62.380.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 366 | 423 | 391 | 58.200.000 | 388 | 58.850.000 | 385 | 59.730.000 | 382 | 60.950.000 | 379 | 62.380.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 391 | 390 | 391 | 1.000.000 | 388 | 1.015.000 | 385 | 1.035.000 | 382 | 1.060.000 | 379 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 700.000 | | 710.000 | | 725.000 | | 740.000 | | 760.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 352 | 397 | 352 | 700.000 | 350 | 710.000 | 348 | 725.000 | 346 | 740.000 | 344 | 760.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.645 | 1.568 | 1.788 | 2.000.000 | 1.777 | 2.025.000 | 1.766 | 2.060.000 | 1.755 | 2.105.000 | 1.744 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 48.800.000 | | 49.345.000 | | 50.085.000 | | 51.110.000 | | 52.310.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.579 | 2.870 | 3.989 | 48.800.000 | 4.002 | 49.345.000 | 4.015 | 50.085.000 | 4.028 | 51.110.000 | 4.041 | 52.310.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 5.800.000 | | 5.865.000 | | 5.955.000 | | 6.080.000 | | 6.225.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 5.800.000 | 4 | 5.865.000 | 4 | 5.955.000 | 4 | 6.080.000 | 4 | 6.225.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 95,95 | 96,45 | 96,95 | 106.662.000 | 97,45 | 107.850.000 | 98,95 | 109.460.000 | 99,45 | 111.695.000 | 99,95 | 114.310.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 106.662.000 | | 107.850.000 | | 109.460.000 | | 111.695.000 | | 114.310.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 106.662.000 | 12 | 107.850.000 | 12 | 109.460.000 | 12 | 111.695.000 | 12 | 114.310.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 108 | 95 | 96 | 74.000.000 | 97 | 74.835.000 | 98 | 75.975.000 | 99 | 77.550.000 | 100 | 79.385.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,306 | 0,200 | 0,100 | | 0,070 | | 0,040 | | 0,010 | | 0,002 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 66,7 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 30 | 40 | 50 | | 60 | | 70 | | 80 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 74.000.000 | | 74.835.000 | | 75.975.000 | | 77.550.000 | | 79.385.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,22 | 1 | 1 | 52.710.000 | 1 | 53.305.000 | 1 | 54.115.000 | 1 | 55.240.000 | 1 | 56.545.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | 100 | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 66,7 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 6.000.000 | | 6.070.000 | | 6.165.000 | | 6.295.000 | | 6.445.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 432 | 432 | 280 | 6.000.000 | 247 | 6.070.000 | 222 | 6.165.000 | 203 | 6.295.000 | 189 | 6.445.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 3.600.000 | | 3.640.000 | | 3.695.000 | | 3.775.000 | | 3.865.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 333 | 398 | 416 | 3.600.000 | 422 | 3.640.000 | 424 | 3.695.000 | 426 | 3.775.000 | 429 | 3.865.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 38.610.000 | | 39.040.000 | | 39.625.000 | | 40.435.000 | | 41.385.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 38.610.000 | 12 | 39.040.000 | 12 | 39.625.000 | 12 | 40.435.000 | 12 | 41.385.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 39 | 3.000.000 | 34 | 3.035.000 | 31 | 3.085.000 | 28 | 3.150.000 | 26 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 35 | 1.200.000 | 38 | 1.215.000 | 46 | 1.235.000 | 54 | 1.265.000 | 61 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 300.000 | | 305.000 | | 310.000 | | 320.000 | | 330.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 300.000 | 8 | 305.000 | 8 | 310.000 | 8 | 320.000 | 8 | 330.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 94,43 | 95 | 95 | 12.290.000 | 95 | 12.430.000 | 95 | 12.620.000 | 95 | 12.880.000 | 95 | 13.185.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 8.000.000 | | 8.090.000 | | 8.215.000 | | 8.385.000 | | 8.585.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.090.000 | 12 | 8.215.000 | 12 | 8.385.000 | 12 | 8.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 4.290.000 | | 4.340.000 | | 4.405.000 | | 4.495.000 | | 4.600.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 4.290.000 | 12 | 4.340.000 | 12 | 4.405.000 | 12 | 4.495.000 | 12 | 4.600.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 5.324 | 5.354 | 5.384 | 9.000.000 | 5.414 | 9.100.000 | 5.444 | 9.240.000 | 5.474 | 9.430.000 | 5.504 | 9.655.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 9.000.000 | | 9.100.000 | | 9.240.000 | | 9.430.000 | | 9.655.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.100.000 | 12 | 9.240.000 | 12 | 9.430.000 | 12 | 9.655.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 25.400.000 | 30 | 25.695.000 | 35 | 26.100.000 | 40 | 26.645.000 | 45 | 27.275.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 104,66 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 25.400.000 | | 25.695.000 | | 26.100.000 | | 26.645.000 | | 27.275.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 104 | 100 | 100 | 25.400.000 | 100 | 25.695.000 | 100 | 26.100.000 | 100 | 26.645.000 | 100 | 27.275.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 61,3 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 15.400.000 | | 15.575.000 | | 15.810.000 | | 16.135.000 | | 16.515.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 20.812 | 17.891 | 20.873 | 15.400.000 | 20.856 | 15.575.000 | 20.839 | 15.810.000 | 20.822 | 16.135.000 | 20.805 | 16.515.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.708 | 4.571 | 5.773 | 2.000.000 | 5.860 | 2.025.000 | 5.948 | 2.060.000 | 6.037 | 2.105.000 | 6.128 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.516 | 6.106 | 6.107 | 2.000.000 | 6.109 | 2.025.000 | 6.110 | 2.060.000 | 6.112 | 2.105.000 | 6.113 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 564 | 563 | 564 | 2.000.000 | 564 | 2.025.000 | 565 | 2.060.000 | 565 | 2.105.000 | 566 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 4.000.000 | | 4.045.000 | | 4.110.000 | | 4.195.000 | | 4.295.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 78 | 74 | 79 | 4.000.000 | 81 | 4.045.000 | 83 | 4.110.000 | 85 | 4.195.000 | 87 | 4.295.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 16.400.000 | | 23.085.000 | | 23.435.000 | | 23.920.000 | | 24.490.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 16.400.000 | 85 | 23.085.000 | 90 | 23.435.000 | 95 | 23.920.000 | 100 | 24.490.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 16.400.000 | | 16.585.000 | | 16.835.000 | | 17.180.000 | | 17.585.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 16.400.000 | 18 | 16.585.000 | 21 | 16.835.000 | 24 | 17.180.000 | 27 | 17.585.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 16.400.000 | | 16.585.000 | | 16.835.000 | | 17.180.000 | | 17.585.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 16.400.000 | 4 | 16.585.000 | 4 | 16.835.000 | 4 | 17.180.000 | 4 | 17.585.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0031 - Puskesmas Tongas** | | | | | **3.845.205.982** | | **3.893.745.000** | | **3.951.835.000** | | **4.032.530.000** | | **4.126.935.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.320.939.982,00 | | 3.357.805.000,00 | | 3.407.840.000,00 | | 3.477.360.000,00 | | 3.558.735.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 96,28 | 94 | 94 | 3.320.939.982 | 94 | 3.357.805.000 | 94 | 3.407.840.000 | 95 | 3.477.360.000 | 95 | 3.558.735.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 3.320.939.982 | | 3.357.805.000 | | 3.407.840.000 | | 3.477.360.000 | | 3.558.735.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 3.320.939.982 | 4 | 3.357.805.000 | 4 | 3.407.840.000 | 4 | 3.477.360.000 | 5 | 3.558.735.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 3.320.939.982 | | 3.357.805.000 | | 3.407.840.000 | | 3.477.360.000 | | 3.558.735.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 3.320.939.982 | 1 | 3.357.805.000 | 1 | 3.407.840.000 | 1 | 3.477.360.000 | 1 | 3.558.735.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 518.660.000 | | 523.770.000 | | 531.640.000 | | 542.555.000 | | 555.280.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 89.126.000 | 100 | 90.120.000 | 100 | 91.465.000 | 100 | 93.335.000 | 100 | 95.520.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 89.126.000 | | 90.120.000 | | 91.465.000 | | 93.335.000 | | 95.520.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 97,01 | 97,1 | 97,48 | 89.126.000 | 97,86 | 90.120.000 | 98,24 | 91.465.000 | 98,62 | 93.335.000 | 99 | 95.520.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 89.126.000 | | 90.120.000 | | 91.465.000 | | 93.335.000 | | 95.520.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 89.126.000 | 4 | 90.120.000 | 4 | 91.465.000 | 4 | 93.335.000 | 4 | 95.520.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 260.542.000 | 0,8 | 262.750.000 | 0,75 | 266.690.000 | 0,7 | 272.160.000 | 0,7 | 278.545.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 29,66 | 29,66 | 28,39 | | 28,18 | | 27,12 | | 25,42 | | 23,52 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 6 | 6 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 10,51 | 9,46 | 9,46 | | 7,66 | | 7,8 | | 6,21 | | 6,21 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 260.542.000 | | 262.750.000 | | 266.690.000 | | 272.160.000 | | 278.545.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 66,60 | 70,60 | 74,60 | 86.340.000 | 78,60 | 86.610.000 | 82,60 | 87.925.000 | 86,60 | 89.745.000 | 90,60 | 91.860.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 86,42 | 89,33 | 89,33 | | 89,33 | | 89,33 | | 89,33 | | 89,33 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 58.140.000 | | 58.085.000 | | 58.955.000 | | 60.165.000 | | 61.580.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 453 | 494 | 472 | 58.140.000 | 469 | 58.085.000 | 466 | 58.955.000 | 463 | 60.165.000 | 460 | 61.580.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 472 | 500 | 472 | 2.400.000 | 469 | 2.430.000 | 466 | 2.470.000 | 463 | 2.525.000 | 460 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 452 | 475 | 452 | 2.000.000 | 449 | 2.025.000 | 446 | 2.060.000 | 443 | 2.105.000 | 440 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.884 | 1.956 | 1.961 | 2.400.000 | 1.949 | 2.430.000 | 1.937 | 2.470.000 | 1.925 | 2.525.000 | 1.913 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 18.400.000 | | 18.605.000 | | 18.885.000 | | 19.275.000 | | 19.730.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan | 3.950 | 3.967 | 4.547 | 18.400.000 | 4.562 | 18.605.000 | 4.577 | 18.885.000 | 4.592 | 19.275.000 | 4.607 | 19.730.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.035.000 | 4 | 3.085.000 | 4 | 3.150.000 | 4 | 3.225.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 93,19 | 93,69 | 94,19 | 174.202.000 | 94,69 | 176.140.000 | 96,19 | 178.765.000 | 96,69 | 182.415.000 | 97,19 | 186.685.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 174.202.000 | | 176.140.000 | | 178.765.000 | | 182.415.000 | | 186.685.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 174.202.000 | 12 | 176.140.000 | 12 | 178.765.000 | 12 | 182.415.000 | 12 | 186.685.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 110 | 95 | 96 | 130.192.000 | 97 | 131.655.000 | 98 | 133.635.000 | 99 | 136.385.000 | 100 | 139.585.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,000 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0,03 | 0,02 | 0,01 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 90,9 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 50,00 | 56,67 | 63,33 | | 70,00 | | 76,67 | | 83,33 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 0 | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | | | | | 130.192.000 | | 131.655.000 | | 133.635.000 | | 136.385.000 | | 139.585.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,73 | 1 | 1 | 103.244.000 | 1 | 104.400.000 | 1 | 105.970.000 | 1 | 108.145.000 | 1 | 110.685.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 90,9 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 7.000.000 | | 7.080.000 | | 7.190.000 | | 7.340.000 | | 7.515.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 480 | 472 | 318 | 7.000.000 | 281 | 7.080.000 | 253 | 7.190.000 | 231 | 7.340.000 | 215 | 7.515.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 693 | 637 | 665 | 3.000.000 | 675 | 3.035.000 | 679 | 3.085.000 | 682 | 3.150.000 | 686 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 89.244.000 | | 90.235.000 | | 91.580.000 | | 93.450.000 | | 95.640.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 89.244.000 | 12 | 90.235.000 | 12 | 91.580.000 | 12 | 93.450.000 | 12 | 95.640.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 1.600.000 | | 1.620.000 | | 1.645.000 | | 1.680.000 | | 1.720.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 89 | 1.600.000 | 77 | 1.620.000 | 68 | 1.645.000 | 61 | 1.680.000 | 56 | 1.720.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.600.000 | | 1.620.000 | | 1.645.000 | | 1.680.000 | | 1.720.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 16 | 1.600.000 | 18 | 1.620.000 | 21 | 1.645.000 | 25 | 1.680.000 | 29 | 1.720.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 800.000 | | 810.000 | | 825.000 | | 845.000 | | 865.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 800.000 | 8 | 810.000 | 8 | 825.000 | 8 | 845.000 | 8 | 865.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 95,95 | 95 | 95 | 13.548.000 | 95 | 13.705.000 | 95 | 13.910.000 | 95 | 14.200.000 | 95 | 14.530.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 3.632.000 | | 3.675.000 | | 3.730.000 | | 3.810.000 | | 3.900.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 3.632.000 | 12 | 3.675.000 | 12 | 3.730.000 | 12 | 3.810.000 | 12 | 3.900.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 9.916.000 | | 10.030.000 | | 10.180.000 | | 10.390.000 | | 10.630.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 9.916.000 | 12 | 10.030.000 | 12 | 10.180.000 | 12 | 10.390.000 | 12 | 10.630.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 8.554 | 8.578 | 8.602 | 13.400.000 | 8.626 | 13.550.000 | 8.650 | 13.755.000 | 8.674 | 14.040.000 | 8.698 | 14.370.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 13.400.000 | | 13.550.000 | | 13.755.000 | | 14.040.000 | | 14.370.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan | 4 | 12 | 12 | 13.400.000 | 12 | 13.550.000 | 12 | 13.755.000 | 12 | 14.040.000 | 12 | 14.370.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 38.800.000 | 30 | 39.245.000 | 35 | 39.850.000 | 40 | 40.675.000 | 45 | 41.630.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 99,47 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 38.800.000 | | 39.245.000 | | 39.850.000 | | 40.675.000 | | 41.630.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 83 | 100 | 100 | 38.800.000 | 100 | 39.245.000 | 100 | 39.850.000 | 100 | 40.675.000 | 100 | 41.630.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 72,41 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 20.818 | 15.590 | 23.139 | 2.000.000 | 23.120 | 2.025.000 | 23.102 | 2.060.000 | 23.084 | 2.105.000 | 23.066 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5.214 | 5.601 | 5.558 | 2.000.000 | 5.641 | 2.025.000 | 5.726 | 2.060.000 | 5.812 | 2.105.000 | 5.899 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.217 | 6.110 | 6.111 | 2.000.000 | 6.113 | 2.025.000 | 6.114 | 2.060.000 | 6.116 | 2.105.000 | 6.117 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 617 | 629 | 630 | 2.000.000 | 630 | 2.025.000 | 631 | 2.060.000 | 631 | 2.105.000 | 632 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 30.800.000 | | 31.145.000 | | 31.610.000 | | 32.255.000 | | 33.010.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 170 | 165 | 170 | 30.800.000 | 174 | 31.145.000 | 178 | 31.610.000 | 182 | 32.255.000 | 186 | 33.010.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 5.606.000 | | 12.170.000 | | 12.355.000 | | 12.615.000 | | 12.920.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 10,8 | 75 | 80 | 5.606.000 | 85 | 12.170.000 | 90 | 12.355.000 | 95 | 12.615.000 | 100 | 12.920.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 5.606.000 | | 5.670.000 | | 5.755.000 | | 5.875.000 | | 6.015.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 5.606.000 | 18 | 5.670.000 | 21 | 5.755.000 | 24 | 5.875.000 | 27 | 6.015.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan | | | | | 5.606.000 | | 5.670.000 | | 5.755.000 | | 5.875.000 | | 6.015.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 5.606.000 | 4 | 5.670.000 | 4 | 5.755.000 | 4 | 5.875.000 | 4 | 6.015.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0032 - Puskesmas Curahtulis** | | | | | **3.122.089.550** | | **3.157.225.000** | | **3.204.330.000** | | **3.269.795.000** | | **3.346.350.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.622.402.550,00 | | 2.651.515.000,00 | | 2.691.025.000,00 | | 2.745.925.000,00 | | 2.810.180.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 95,2 | 94 | 94 | 2.622.402.550 | 94 | 2.651.515.000 | 94 | 2.691.025.000 | 95 | 2.745.925.000 | 95 | 2.810.180.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.622.402.550 | | 2.651.515.000 | | 2.691.025.000 | | 2.745.925.000 | | 2.810.180.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 2.622.402.550 | 4 | 2.651.515.000 | 4 | 2.691.025.000 | 4 | 2.745.925.000 | 5 | 2.810.180.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.622.402.550 | | 2.651.515.000 | | 2.691.025.000 | | 2.745.925.000 | | 2.810.180.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.622.402.550 | 1 | 2.651.515.000 | 1 | 2.691.025.000 | 1 | 2.745.925.000 | 1 | 2.810.180.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 478.087.000 | | 477.370.000 | | 484.535.000 | | 494.505.000 | | 506.110.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 73.087.000 | 100 | 73.900.000 | 100 | 75.005.000 | 100 | 76.540.000 | 100 | 78.335.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 73.087.000 | | 73.900.000 | | 75.005.000 | | 76.540.000 | | 78.335.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 98,43 | 98,5 | 98,6 | 73.087.000 | 98,7 | 73.900.000 | 98,8 | 75.005.000 | 98,9 | 76.540.000 | 99 | 78.335.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 73.087.000 | | 73.900.000 | | 75.005.000 | | 76.540.000 | | 78.335.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 73.087.000 | 4 | 73.900.000 | 4 | 75.005.000 | 4 | 76.540.000 | 4 | 78.335.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 203.000.000 | 0,8 | 199.205.000 | 0,75 | 202.190.000 | 0,7 | 206.345.000 | 0,7 | 211.185.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 4,57 | 4,57 | 3,96 | | 3,66 | | 3,35 | | 2,74 | | 2,44 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 5,36 | 4,82 | 4,34 | | 3,91 | | 3,52 | | 3,17 | | 3,17 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 203.000.000 | | 199.205.000 | | 202.190.000 | | 206.345.000 | | 211.185.000 | |
| Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 62,61 | 66,61 | 70,61 | 79.700.000 | 74,61 | 74.535.000 | 78,61 | 75.660.000 | 82,61 | 77.230.000 | 86,61 | 79.045.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 92,33 | 92,38 | 92,43 | | 92,48 | | 92,53 | | 92,58 | | 92,63 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 53.400.000 | | 47.930.000 | | 48.650.000 | | 49.650.000 | | 50.815.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 345 | 383 | 358 | 53.400.000 | 355 | 47.930.000 | 353 | 48.650.000 | 351 | 49.650.000 | 349 | 50.815.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 358 | 410 | 358 | 1.200.000 | 355 | 1.215.000 | 353 | 1.235.000 | 351 | 1.265.000 | 349 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 387 | 408 | 397 | 1.200.000 | 394 | 1.215.000 | 391 | 1.235.000 | 388 | 1.265.000 | 385 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.886 | 1.801 | 1.984 | 1.200.000 | 1.972 | 1.215.000 | 1.960 | 1.235.000 | 1.948 | 1.265.000 | 1.936 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 19.500.000 | | 19.720.000 | | 20.015.000 | | 20.425.000 | | 20.905.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.294 | 2.854 | 4.417 | 19.500.000 | 4.432 | 19.720.000 | 4.447 | 20.015.000 | 4.462 | 20.425.000 | 4.477 | 20.905.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 3.200.000 | | 3.240.000 | | 3.290.000 | | 3.360.000 | | 3.440.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 3.200.000 | 4 | 3.240.000 | 4 | 3.290.000 | 4 | 3.360.000 | 4 | 3.440.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 71,22 | 76,22 | 81,22 | 123.300.000 | 82,72 | 124.670.000 | 82,77 | 126.530.000 | 82,82 | 129.115.000 | 82,87 | 132.140.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 123.300.000 | | 124.670.000 | | 126.530.000 | | 129.115.000 | | 132.140.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 123.300.000 | 12 | 124.670.000 | 12 | 126.530.000 | 12 | 129.115.000 | 12 | 132.140.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 115 | 95 | 96 | 180.600.000 | 97 | 182.620.000 | 98 | 185.360.000 | 99 | 189.170.000 | 100 | 193.610.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,000 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 33,3 | 42,75 | 52,2 | | 61,65 | | 71,1 | | 80,55 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 33,33 | 35 | 40 | | 45 | | 50 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 180.600.000 | | 182.620.000 | | 185.360.000 | | 189.170.000 | | 193.610.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 1,17 | 1 | 1 | 117.280.000 | 1 | 118.590.000 | 1 | 120.370.000 | 1 | 122.850.000 | 1 | 125.730.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 4.800.000 | | 4.855.000 | | 4.930.000 | | 5.035.000 | | 5.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 416 | 413 | 279 | 4.800.000 | 246 | 4.855.000 | 221 | 4.930.000 | 202 | 5.035.000 | 188 | 5.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 1.600.000 | | 1.620.000 | | 1.645.000 | | 1.680.000 | | 1.720.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 508 | 506 | 528 | 1.600.000 | 536 | 1.620.000 | 539 | 1.645.000 | 542 | 1.680.000 | 545 | 1.720.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 103.680.000 | | 104.830.000 | | 106.395.000 | | 108.570.000 | | 111.110.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 103.680.000 | 12 | 104.830.000 | 12 | 106.395.000 | 12 | 108.570.000 | 12 | 111.110.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 4.800.000 | | 4.855.000 | | 4.930.000 | | 5.035.000 | | 5.155.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 38 | 4.800.000 | 34 | 4.855.000 | 30 | 4.930.000 | 28 | 5.035.000 | 26 | 5.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 508 | 506 | 528 | 1.200.000 | 536 | 1.215.000 | 539 | 1.235.000 | 542 | 1.265.000 | 545 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.200.000 | 8 | 1.215.000 | 8 | 1.235.000 | 8 | 1.265.000 | 8 | 1.295.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 88,54 | 95 | 95 | 45.320.000 | 95 | 45.830.000 | 95 | 46.515.000 | 95 | 47.465.000 | 95 | 48.580.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 33.800.000 | | 34.180.000 | | 34.690.000 | | 35.400.000 | | 36.230.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 33.800.000 | 12 | 34.180.000 | 12 | 34.690.000 | 12 | 35.400.000 | 12 | 36.230.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 11.520.000 | | 11.650.000 | | 11.825.000 | | 12.065.000 | | 12.350.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 11.520.000 | 12 | 11.650.000 | 12 | 11.825.000 | 12 | 12.065.000 | 12 | 12.350.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 7.152 | 7.170 | 7.188 | 18.000.000 | 7.206 | 18.200.000 | 7.224 | 18.475.000 | 7.242 | 18.855.000 | 7.260 | 19.300.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 18.000.000 | | 18.200.000 | | 18.475.000 | | 18.855.000 | | 19.300.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 18.000.000 | 12 | 18.200.000 | 12 | 18.475.000 | 12 | 18.855.000 | 12 | 19.300.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 21.400.000 | 30 | 21.645.000 | 35 | 21.980.000 | 40 | 22.450.000 | 45 | 22.980.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 69,75 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 21.400.000 | | 21.645.000 | | 21.980.000 | | 22.450.000 | | 22.980.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 98 | 100 | 100 | 21.400.000 | 100 | 21.645.000 | 100 | 21.980.000 | 100 | 22.450.000 | 100 | 22.980.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 1,2179 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 19.696 | 15.560 | 21.383 | 1.200.000 | 21.366 | 1.215.000 | 21.349 | 1.235.000 | 21.332 | 1.265.000 | 21.315 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.779 | 4.407 | 5.336 | 1.200.000 | 5.416 | 1.215.000 | 5.497 | 1.235.000 | 5.579 | 1.265.000 | 5.663 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.402 | 5.926 | 5.927 | 1.200.000 | 5.929 | 1.215.000 | 5.930 | 1.235.000 | 5.931 | 1.265.000 | 5.933 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 1.200.000 | | 1.215.000 | | 1.235.000 | | 1.265.000 | | 1.295.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 556 | 702 | 703 | 1.200.000 | 703 | 1.215.000 | 704 | 1.235.000 | 705 | 1.265.000 | 705 | 1.295.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 16.600.000 | | 16.785.000 | | 17.040.000 | | 17.390.000 | | 17.800.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 71 | 70 | 74 | 16.600.000 | 76 | 16.785.000 | 78 | 17.040.000 | 80 | 17.390.000 | 82 | 17.800.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 21.600.000 | | 28.340.000 | | 28.770.000 | | 29.365.000 | | 30.060.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 89 | 75 | 80 | 21.600.000 | 85 | 28.340.000 | 90 | 28.770.000 | 95 | 29.365.000 | 100 | 30.060.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 21.600.000 | | 21.840.000 | | 22.170.000 | | 22.625.000 | | 23.155.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 21.600.000 | 18 | 21.840.000 | 21 | 22.170.000 | 24 | 22.625.000 | 27 | 23.155.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 21.600.000 | | 21.840.000 | | 22.170.000 | | 22.625.000 | | 23.155.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 21.600.000 | 4 | 21.840.000 | 4 | 22.170.000 | 4 | 22.625.000 | 4 | 23.155.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0033 - Puskesmas Sumberasih** | | | | | **5.985.501.550** | | **6.058.495.000** | | **6.148.835.000** | | **6.274.330.000** | | **6.421.195.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 5.106.769.550,00 | | 5.163.455.000,00 | | 5.240.395.000,00 | | 5.347.300.000,00 | | 5.472.430.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 94,38 | 94 | 94 | 5.106.769.550 | 94 | 5.163.455.000 | 94 | 5.240.395.000 | 95 | 5.347.300.000 | 95 | 5.472.430.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 5.106.769.550 | | 5.163.455.000 | | 5.240.395.000 | | 5.347.300.000 | | 5.472.430.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 5.106.769.550 | 4 | 5.163.455.000 | 4 | 5.240.395.000 | 4 | 5.347.300.000 | 5 | 5.472.430.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 5.106.769.550 | | 5.163.455.000 | | 5.240.395.000 | | 5.347.300.000 | | 5.472.430.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 5.106.769.550 | 1 | 5.163.455.000 | 1 | 5.240.395.000 | 1 | 5.347.300.000 | 1 | 5.472.430.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 866.092.000 | | 875.755.000 | | 888.860.000 | | 907.045.000 | | 928.305.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 142.165.700 | 100 | 143.745.000 | 100 | 145.890.000 | 100 | 148.870.000 | 100 | 152.355.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 142.165.700 | | 143.745.000 | | 145.890.000 | | 148.870.000 | | 152.355.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 96,92 | 97 | 97,4 | 142.165.700 | 97,8 | 143.745.000 | 98,2 | 145.890.000 | 98,6 | 148.870.000 | 99 | 152.355.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 142.165.700 | | 143.745.000 | | 145.890.000 | | 148.870.000 | | 152.355.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 142.165.700 | 4 | 143.745.000 | 4 | 145.890.000 | 4 | 148.870.000 | 4 | 152.355.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0,9 | 0 | 0,8 | 378.458.800 | 0,8 | 382.675.000 | 0,75 | 388.390.000 | 0,7 | 396.335.000 | 0,7 | 405.620.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 8,05 | 8,05 | 7,74 | | 7,66 | | 7,26 | | 6,74 | | 6,31 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 17 | 15 | 15 | | 14 | | 12 | | 12 | | 11 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 7,43 | 6,69 | 6,02 | | 6,02 | | 6,9 | | 5,9 | | 4,83 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 378.458.800 | | 382.675.000 | | 388.390.000 | | 396.335.000 | | 405.620.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 93,38 | 93,88 | 94,38 | 279.738.800 | 94,88 | 282.845.000 | 96,38 | 287.060.000 | 96,88 | 292.920.000 | 97,38 | 299.775.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 279.738.800 | | 282.845.000 | | 287.060.000 | | 292.920.000 | | 299.775.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 279.738.800 | 12 | 282.845.000 | 12 | 287.060.000 | 12 | 292.920.000 | 12 | 299.775.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 66,1 | 70,1 | 74,1 | 98.720.000 | 78,1 | 99.830.000 | 82,1 | 101.330.000 | 86,1 | 103.415.000 | 90,1 | 105.845.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 85,01 | 85,51 | 86,01 | | 86,51 | | 87,41 | | 88,31 | | 89,21 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 42.120.000 | | 42.590.000 | | 43.225.000 | | 44.110.000 | | 45.145.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 846 | 821 | 879 | 42.120.000 | 873 | 42.590.000 | 867 | 43.225.000 | 861 | 44.110.000 | 855 | 45.145.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 2.200.000 | | 2.225.000 | | 2.260.000 | | 2.310.000 | | 2.365.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 879 | 978 | 879 | 2.200.000 | 873 | 2.225.000 | 867 | 2.260.000 | 861 | 2.310.000 | 855 | 2.365.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 879 | 950 | 879 | 1.000.000 | 873 | 1.015.000 | 867 | 1.035.000 | 861 | 1.060.000 | 855 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 5.200.000 | | 5.260.000 | | 5.340.000 | | 5.450.000 | | 5.580.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.821 | 3.622 | 3.927 | 5.200.000 | 3.903 | 5.260.000 | 3.880 | 5.340.000 | 3.857 | 5.450.000 | 3.834 | 5.580.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 42.800.000 | | 43.280.000 | | 43.925.000 | | 44.825.000 | | 45.875.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7.833 | 7.905 | 8.446 | 42.800.000 | 8.474 | 43.280.000 | 8.502 | 43.925.000 | 8.530 | 44.825.000 | 8.558 | 45.875.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 5.400.000 | | 5.460.000 | | 5.545.000 | | 5.660.000 | | 5.795.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 5.400.000 | 4 | 5.460.000 | 4 | 5.545.000 | 4 | 5.660.000 | 4 | 5.795.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 112 | 95 | 96 | 241.867.500 | 97 | 244.575.000 | 98 | 248.245.000 | 99 | 253.330.000 | 100 | 259.270.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,091 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 60 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 30,80 | 40,67 | 50,53 | | 60,40 | | 70,27 | | 80,13 | | 90,00 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 53,85 | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 241.867.500 | | 244.575.000 | | 248.245.000 | | 253.330.000 | | 259.270.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 2,34 | 1 | 1 | 192.500.000 | 1 | 194.540.000 | 1 | 197.310.000 | 1 | 201.145.000 | 1 | 205.620.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 60 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 14.000.000 | | 14.160.000 | | 14.375.000 | | 14.670.000 | | 15.015.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 820 | 940 | 634 | 14.000.000 | 560 | 14.160.000 | 504 | 14.375.000 | 460 | 14.670.000 | 428 | 15.015.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 12.000.000 | | 12.135.000 | | 12.320.000 | | 12.575.000 | | 12.870.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1.000 | 1.037 | 1.083 | 12.000.000 | 1.098 | 12.135.000 | 1.105 | 12.320.000 | 1.111 | 12.575.000 | 1.117 | 12.870.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 151.100.000 | | 152.665.000 | | 154.790.000 | | 157.745.000 | | 161.200.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 151.100.000 | 12 | 152.665.000 | 12 | 154.790.000 | 12 | 157.745.000 | 12 | 161.200.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 14.000.000 | | 14.160.000 | | 14.375.000 | | 14.670.000 | | 15.015.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 151 | 14.000.000 | 133 | 14.160.000 | 120 | 14.375.000 | 109 | 14.670.000 | 102 | 15.015.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 27 | 1.000.000 | 30 | 1.015.000 | 35 | 1.035.000 | 41 | 1.060.000 | 47 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 400.000 | | 405.000 | | 415.000 | | 425.000 | | 435.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 400.000 | 8 | 405.000 | 8 | 415.000 | 8 | 425.000 | 8 | 435.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 93,38 | 93,88 | 94,38 | 30.567.500 | 94,88 | 31.025.000 | 96,38 | 31.640.000 | 96,88 | 32.495.000 | 97,38 | 33.495.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 20.567.500 | | 20.800.000 | | 21.110.000 | | 21.545.000 | | 22.050.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 20.567.500 | 12 | 20.800.000 | 12 | 21.110.000 | 12 | 21.545.000 | 12 | 22.050.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 10.000.000 | | 10.225.000 | | 10.530.000 | | 10.950.000 | | 11.445.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.225.000 | 12 | 10.530.000 | 12 | 10.950.000 | 12 | 11.445.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 15.222 | 15.272 | 15.322 | 18.800.000 | 15.372 | 19.010.000 | 15.422 | 19.295.000 | 15.472 | 19.690.000 | 15.522 | 20.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 18.800.000 | | 19.010.000 | | 19.295.000 | | 19.690.000 | | 20.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 18.800.000 | 12 | 19.010.000 | 12 | 19.295.000 | 12 | 19.690.000 | 12 | 20.155.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 103.600.000 | 30 | 104.760.000 | 35 | 106.335.000 | 40 | 108.510.000 | 45 | 111.060.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 92,98 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 103.600.000 | | 104.760.000 | | 106.335.000 | | 108.510.000 | | 111.060.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 103.600.000 | 100 | 104.760.000 | 100 | 106.335.000 | 100 | 108.510.000 | 100 | 111.060.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 92,62 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 54.600.000 | | 55.210.000 | | 56.035.000 | | 57.180.000 | | 58.520.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 42.050 | 36.393 | 42.503 | 54.600.000 | 42.469 | 55.210.000 | 42.435 | 56.035.000 | 42.401 | 57.180.000 | 42.367 | 58.520.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 23.400.000 | | 23.660.000 | | 24.015.000 | | 24.505.000 | | 25.080.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 8.224 | 9.080 | 9.350 | 23.400.000 | 9.490 | 23.660.000 | 9.632 | 24.015.000 | 9.776 | 24.505.000 | 9.923 | 25.080.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 3.800.000 | | 3.845.000 | | 3.905.000 | | 3.985.000 | | 4.080.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.810 | 8.254 | 8.256 | 3.800.000 | 8.258 | 3.845.000 | 8.260 | 3.905.000 | 8.261 | 3.985.000 | 8.263 | 4.080.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 3.800.000 | | 3.845.000 | | 3.905.000 | | 3.985.000 | | 4.080.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.111 | 1.133 | 1.134 | 3.800.000 | 1.135 | 3.845.000 | 1.136 | 3.905.000 | 1.137 | 3.985.000 | 1.139 | 4.080.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 18.000.000 | | 18.200.000 | | 18.475.000 | | 18.855.000 | | 19.300.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 135 | 135 | 135 | 18.000.000 | 138 | 18.200.000 | 141 | 18.475.000 | 144 | 18.855.000 | 147 | 19.300.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN | | | | | 12.640.000 | | 19.285.000 | | 19.580.000 | | 19.985.000 | | 20.460.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 35 | 75 | 80 | 12.640.000 | 85 | 19.285.000 | 90 | 19.580.000 | 95 | 19.985.000 | 100 | 20.460.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kader posyandu dengan strata minimal madya (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya | | | | | 12.640.000 | | 12.785.000 | | 12.980.000 | | 13.245.000 | | 13.555.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 12 | 15 | 12.640.000 | 18 | 12.785.000 | 21 | 12.980.000 | 24 | 13.245.000 | 27 | 13.555.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 12.640.000 | | 12.785.000 | | 12.980.000 | | 13.245.000 | | 13.555.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 12.640.000 | 4 | 12.785.000 | 4 | 12.980.000 | 4 | 13.245.000 | 4 | 13.555.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0034 - Puskesmas Sukapura** | | | | | **2.134.604.670** | | **2.164.655.000** | | **2.196.990.000** | | **2.241.885.000** | | **2.294.395.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 1.722.137.670,00 | | 1.741.255.000,00 | | 1.767.200.000,00 | | 1.803.255.000,00 | | 1.845.455.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 90,38 | 91 | 92 | 1.722.137.670 | 93 | 1.741.255.000 | 94 | 1.767.200.000 | 95 | 1.803.255.000 | 95 | 1.845.455.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 1.722.137.670 | | 1.741.255.000 | | 1.767.200.000 | | 1.803.255.000 | | 1.845.455.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 1.722.137.670 | 4 | 1.741.255.000 | 4 | 1.767.200.000 | 4 | 1.803.255.000 | 5 | 1.845.455.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 1.722.137.670 | | 1.741.255.000 | | 1.767.200.000 | | 1.803.255.000 | | 1.845.455.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 1.722.137.670 | 1 | 1.741.255.000 | 1 | 1.767.200.000 | 1 | 1.803.255.000 | 1 | 1.845.455.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN | | | | | 404.067.000 | | 408.405.000 | | 414.565.000 | | 423.085.000 | | 433.020.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 142.232.000 | 100 | 143.815.000 | 100 | 145.960.000 | 100 | 148.940.000 | 100 | 152.430.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 142.232.000 | | 143.815.000 | | 145.960.000 | | 148.940.000 | | 152.430.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 92,14 | 92,2 | 93,56 | 142.232.000 | 94,92 | 143.815.000 | 96,28 | 145.960.000 | 97,64 | 148.940.000 | 99 | 152.430.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 142.232.000 | | 143.815.000 | | 145.960.000 | | 148.940.000 | | 152.430.000 | |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 142.232.000 | 4 | 143.815.000 | 4 | 145.960.000 | 4 | 148.940.000 | 4 | 152.430.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | 165.235.000 | 0 | 166.885.000 | 0 | 169.395.000 | 0 | 172.880.000 | 0 | 176.940.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 8,64 | 7,73 | 7,27 | | 6,82 | | 6,36 | | 5,91 | | 5,45 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 2,85 | 2,57 | 2,31 | | 2,08 | | 1,87 | | 1,68 | | 1,51 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 165.235.000 | | 166.885.000 | | 169.395.000 | | 172.880.000 | | 176.940.000 | |
| Meningkatkan pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 81,7 | 82,7 | 83,7 | 122.160.000 | 84,7 | 123.330.000 | 85,7 | 125.190.000 | 86,7 | 127.770.000 | 87,7 | 130.770.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 99,56 | 99,56 | 99,56 | | 99,56 | | 99,56 | | 99,56 | | 99,56 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 65.080.000 | | 65.605.000 | | 66.585.000 | | 67.950.000 | | 69.545.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 188 | 155 | 229 | 65.080.000 | 227 | 65.605.000 | 225 | 66.585.000 | 223 | 67.950.000 | 221 | 69.545.000 | |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 229 | 215 | 229 | 2.400.000 | 227 | 2.430.000 | 225 | 2.470.000 | 223 | 2.525.000 | 221 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 224 | 212 | 224 | 2.000.000 | 222 | 2.025.000 | 220 | 2.060.000 | 218 | 2.105.000 | 216 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 2.400.000 | | 2.430.000 | | 2.470.000 | | 2.525.000 | | 2.585.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 668 | 606 | 668 | 2.400.000 | 664 | 2.430.000 | 660 | 2.470.000 | 656 | 2.525.000 | 652 | 2.585.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 33.200.000 | | 33.570.000 | | 34.075.000 | | 34.775.000 | | 35.590.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.290 | 2.316 | 2.290 | 33.200.000 | 2.298 | 33.570.000 | 2.306 | 34.075.000 | 2.314 | 34.775.000 | 2.322 | 35.590.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 17.080.000 | | 17.270.000 | | 17.530.000 | | 17.890.000 | | 18.310.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 17.080.000 | 4 | 17.270.000 | 4 | 17.530.000 | 4 | 17.890.000 | 4 | 18.310.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 98,85 | 98,85 | 98,85 | 43.075.000 | 98,85 | 43.555.000 | 98,85 | 44.205.000 | 98,85 | 45.110.000 | 99,35 | 46.170.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 43.075.000 | | 43.555.000 | | 44.205.000 | | 45.110.000 | | 46.170.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 43.075.000 | 12 | 43.555.000 | 12 | 44.205.000 | 12 | 45.110.000 | 12 | 46.170.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 138 | 95 | 96 | 81.200.000 | 97 | 82.120.000 | 98 | 83.375.000 | 99 | 85.095.000 | 100 | 87.095.000 | |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,203 | 0,19 | 0,14 | | 0,09 | | 0,04 | | 0,035 | | 0,03 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 41,7 | 49,75 | 57,8 | | 65,85 | | 73,9 | | 81,95 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 81.200.000 | | 82.120.000 | | 83.375.000 | | 85.095.000 | | 87.095.000 | |
| | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 0,66 | 1 | 1 | 66.650.000 | 1 | 67.400.000 | 1 | 68.425.000 | 1 | 69.835.000 | 1 | 71.475.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 7.000.000 | | 7.080.000 | | 7.190.000 | | 7.340.000 | | 7.515.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 256 | 253 | 171 | 7.000.000 | 151 | 7.080.000 | 136 | 7.190.000 | 124 | 7.340.000 | 115 | 7.515.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 245 | 252 | 263 | 3.000.000 | 267 | 3.035.000 | 268 | 3.085.000 | 270 | 3.150.000 | 271 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 50.850.000 | | 51.415.000 | | 52.180.000 | | 53.245.000 | | 54.490.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 4 | 12 | 50.850.000 | 12 | 51.415.000 | 12 | 52.180.000 | 12 | 53.245.000 | 12 | 54.490.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 13 | 3.000.000 | 11 | 3.035.000 | 10 | 3.085.000 | 9 | 3.150.000 | 9 | 3.225.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 19 | 2.000.000 | 22 | 2.025.000 | 26 | 2.060.000 | 30 | 2.105.000 | 35 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 800.000 | | 810.000 | | 825.000 | | 845.000 | | 865.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 800.000 | 8 | 810.000 | 8 | 825.000 | 8 | 845.000 | 8 | 865.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 94,91 | 95 | 95 | 8.850.000 | 95 | 8.955.000 | 95 | 9.095.000 | 95 | 9.285.000 | 95 | 9.505.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 3.200.000 | | 3.240.000 | | 3.290.000 | | 3.360.000 | | 3.440.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 3.200.000 | 12 | 3.240.000 | 12 | 3.290.000 | 12 | 3.360.000 | 12 | 3.440.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 5.650.000 | | 5.715.000 | | 5.805.000 | | 5.925.000 | | 6.065.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 5.650.000 | 12 | 5.715.000 | 12 | 5.805.000 | 12 | 5.925.000 | 12 | 6.065.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 2.378 | 2.418 | 2.458 | 5.700.000 | 2.498 | 5.765.000 | 2.538 | 5.855.000 | 2.578 | 5.975.000 | 2.618 | 6.115.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 5.700.000 | | 5.765.000 | | 5.855.000 | | 5.975.000 | | 6.115.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 5.700.000 | 12 | 5.765.000 | 12 | 5.855.000 | 12 | 5.975.000 | 12 | 6.115.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 15.400.000 | 30 | 15.585.000 | 35 | 15.835.000 | 40 | 16.170.000 | 45 | 16.555.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 88,12 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 88,50 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 15.400.000 | | 15.585.000 | | 15.835.000 | | 16.170.000 | | 16.555.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 49,6 | 100 | 100 | 15.400.000 | 100 | 15.585.000 | 100 | 15.835.000 | 100 | 16.170.000 | 100 | 16.555.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 9,87 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.054 | 2.316 | 12.467 | 2.000.000 | 12.457 | 2.025.000 | 12.447 | 2.060.000 | 12.437 | 2.105.000 | 12.427 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 6.600.000 | | 6.675.000 | | 6.775.000 | | 6.915.000 | | 7.080.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.730 | 2.797 | 3.450 | 6.600.000 | 3.502 | 6.675.000 | 3.555 | 6.775.000 | 3.608 | 6.915.000 | 3.662 | 7.080.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 726 | 595 | 595 | 2.000.000 | 595 | 2.025.000 | 595 | 2.060.000 | 596 | 2.105.000 | 596 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 348 | 277 | 277 | 2.000.000 | 278 | 2.025.000 | 278 | 2.060.000 | 278 | 2.105.000 | 278 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 2.800.000 | | 2.835.000 | | 2.880.000 | | 2.940.000 | | 3.010.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 38 | 38 | 40 | 2.800.000 | 41 | 2.835.000 | 42 | 2.880.000 | 43 | 2.940.000 | 44 | 3.010.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 8.400.000 | | 14.995.000 | | 15.225.000 | | 15.545.000 | | 15.920.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 100 | 75 | 80 | 8.400.000 | 85 | 14.995.000 | 90 | 15.225.000 | 95 | 15.545.000 | 100 | 15.920.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 8.400.000 | | 8.495.000 | | 8.625.000 | | 8.805.000 | | 9.015.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 0 | 12 | 15 | 8.400.000 | 18 | 8.495.000 | 21 | 8.625.000 | 24 | 8.805.000 | 27 | 9.015.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 8.400.000 | | 8.495.000 | | 8.625.000 | | 8.805.000 | | 9.015.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan | 3 | 4 | 4 | 8.400.000 | 4 | 8.495.000 | 4 | 8.625.000 | 4 | 8.805.000 | 4 | 9.015.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0035 - Puskesmas Sumber** | | | | | **2.633.629.307** | | **2.668.505.000** | | **2.708.350.000** | | **2.763.685.000** | | **2.828.395.000** | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.177.856.307,00 | | 2.202.035.000,00 | | 2.234.850.000,00 | | 2.280.445.000,00 | | 2.333.810.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%) | 90,82 | 91 | 92 | 2.177.856.307 | 93 | 2.202.035.000 | 94 | 2.234.850.000 | 95 | 2.280.445.000 | 95 | 2.333.810.000 | |
| 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 2.177.856.307 | | 2.202.035.000 | | 2.234.850.000 | | 2.280.445.000 | | 2.333.810.000 | |
| Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar | Jumlah komponen PKP yang tercapai (komponen) | 5 | 4 | 4 | 2.177.856.307 | 4 | 2.202.035.000 | 4 | 2.234.850.000 | 4 | 2.280.445.000 | 5 | 2.333.810.000 | |
| 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 2.177.856.307 | | 2.202.035.000 | | 2.234.850.000 | | 2.280.445.000 | | 2.333.810.000 | |
| Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 2.177.856.307 | 1 | 2.202.035.000 | 1 | 2.234.850.000 | 1 | 2.280.445.000 | 1 | 2.333.810.000 | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 429.673.000 | | 433.580.000 | | 440.115.000 | | 449.165.000 | | 459.705.000 | |
| Menguatnya sistem kesehatan | Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 | 77.913.000 | 100 | 78.780.000 | 100 | 79.955.000 | 100 | 81.590.000 | 100 | 83.500.000 | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 77.913.000 | | 78.780.000 | | 79.955.000 | | 81.590.000 | | 83.500.000 | |
| Meningkatnya tata Kelola pelayanan kesehatan | Cakupan pemenuhan kebutuhan Operasional fasyankes (%) | 88,08 | 88,1 | 90,28 | 77.913.000 | 92,46 | 78.780.000 | 94,64 | 79.955.000 | 96,82 | 81.590.000 | 99 | 83.500.000 | |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 77.913.000 | | 78.780.000 | | 79.955.000 | | 81.590.000 | | 83.500.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 77.913.000 | 4 | 78.780.000 | 4 | 79.955.000 | 4 | 81.590.000 | 4 | 83.500.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%) | 0 | 0 | 0 | 198.640.000 | 0 | 199.950.000 | 0 | 202.955.000 | 0 | 207.120.000 | 0 | 211.980.000 | |
| | Persentase anemia pada ibu hamil (%) | 1,75 | 1,4 | 1,05 | | 0,7 | | 0,35 | | 0,35 | | 0,35 | | |
| | Jumlah Kematian Bayi (Orang) | 7 | 7 | 6 | | 6 | | 6 | | 5 | | 5 | | |
| | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%) | 6,06 | 5,45 | 4,91 | | 4,91 | | 3,98 | | 3,98 | | 3,98 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 198.640.000 | | 199.950.000 | | 202.955.000 | | 207.120.000 | | 211.980.000 | |
| Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat | Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) | 82,95 | 84,45 | 85,95 | 78.020.000 | 87,45 | 78.890.000 | 87,5 | 80.070.000 | 87,55 | 81.705.000 | 87,6 | 83.620.000 | |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 78.020.000 | | 78.890.000 | | 80.070.000 | | 81.705.000 | | 83.620.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 78.020.000 | 12 | 78.890.000 | 12 | 80.070.000 | 12 | 81.705.000 | 12 | 83.620.000 | |
| Meningkatnya pelayanan preventif kesehatan ibu dan anak | Persentase ANC 6 kali (K6) (%) | 81,18 | 82,18 | 83,18 | 120.620.000 | 84,18 | 121.060.000 | 85,18 | 122.885.000 | 86,18 | 125.415.000 | 87,18 | 128.360.000 | |
| | Persentase remaja putri diskrining anemia (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) | 87,74 | 87,74 | 88,52 | | 89,8 | | 90,32 | | 90,32 | | 90,32 | | |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 77.220.000 | | 77.170.000 | | 78.325.000 | | 79.930.000 | | 81.805.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 289 | 267 | 289 | 77.220.000 | 287 | 77.170.000 | 285 | 78.325.000 | 283 | 79.930.000 | 281 | 81.805.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 800.000 | | 810.000 | | 825.000 | | 845.000 | | 865.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 265 | 292 | 289 | 800.000 | 287 | 810.000 | 285 | 825.000 | 283 | 845.000 | 281 | 865.000 | |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 272 | 297 | 272 | 1.000.000 | 270 | 1.015.000 | 268 | 1.035.000 | 266 | 1.060.000 | 264 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 1.800.000 | | 1.820.000 | | 1.850.000 | | 1.890.000 | | 1.935.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.293 | 1.287 | 1.293 | 1.800.000 | 1.285 | 1.820.000 | 1.277 | 1.850.000 | 1.269 | 1.890.000 | 1.261 | 1.935.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 34.200.000 | | 34.580.000 | | 35.100.000 | | 35.820.000 | | 36.660.000 | |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.538 | 2.915 | 2.819 | 34.200.000 | 2.828 | 34.580.000 | 2.837 | 35.100.000 | 2.846 | 35.820.000 | 2.855 | 36.660.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 5.600.000 | | 5.665.000 | | 5.750.000 | | 5.870.000 | | 6.010.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12 | 4 | 5.600.000 | 4 | 5.665.000 | 4 | 5.750.000 | 4 | 5.870.000 | 4 | 6.010.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 367 | 95 | 96 | 128.320.000 | 97 | 129.760.000 | 98 | 131.720.000 | 99 | 134.435.000 | 100 | 137.590.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (orang) | 0,000 | 0,010 | 0,010 | | 0,005 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,003 | | |
| | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (per 1.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | 0 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%) | 33,3 | 42,75 | 52,2 | | 61,65 | | 71,1 | | 80,55 | | 90 | | |
| | Persentase desa mencapai target STBM (%) | 33,33 | 35 | 45 | | 55 | | 60 | | 70 | | 80 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 128.320.000 | | 129.760.000 | | 131.720.000 | | 134.435.000 | | 137.590.000 | |
| Meningkatnya cakupan deteksi dini dan tata laksana penyakit menular | Insidensi Tuberkulosis (per 1.000 penduduk) | 0,11 | 1 | 1 | 98.178.000 | 1 | 99.280.000 | 1 | 100.785.000 | 1 | 102.860.000 | 1 | 105.275.000 | |
| | Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) | N/A | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | | 95 | | |
| | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%) | N/A | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 7.200.000 | | 7.280.000 | | 7.390.000 | | 7.545.000 | | 7.725.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 257 | 317 | 214 | 7.200.000 | 189 | 7.280.000 | 170 | 7.390.000 | 155 | 7.545.000 | 144 | 7.725.000 | |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan | | | | | 3.000.000 | | 3.035.000 | | 3.085.000 | | 3.150.000 | | 3.225.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 258 | 157 | 164 | 3.000.000 | 166 | 3.035.000 | 167 | 3.085.000 | 168 | 3.150.000 | 169 | 3.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 84.978.000 | | 85.920.000 | | 87.205.000 | | 88.985.000 | | 91.070.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 84.978.000 | 12 | 85.920.000 | 12 | 87.205.000 | 12 | 88.985.000 | 12 | 91.070.000 | |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 3 | 1.000.000 | 3 | 1.015.000 | 2 | 1.035.000 | 2 | 1.060.000 | 2 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | 0 | 19 | 1.000.000 | 22 | 1.015.000 | 26 | 1.035.000 | 30 | 1.060.000 | 35 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 0 | 8 | 1.000.000 | 8 | 1.015.000 | 8 | 1.035.000 | 8 | 1.060.000 | 8 | 1.085.000 | |
| Meningkatnya cakupan pencegahan penyakit | Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%) | 99,37 | 95 | 95 | 19.342.000 | 95 | 19.560.000 | 95 | 19.850.000 | 95 | 20.260.000 | 95 | 20.735.000 | |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 9.900.000 | | 10.010.000 | | 10.160.000 | | 10.370.000 | | 10.615.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 9.900.000 | 12 | 10.010.000 | 12 | 10.160.000 | 12 | 10.370.000 | 12 | 10.615.000 | |
| 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | 9.442.000 | | 9.550.000 | | 9.690.000 | | 9.890.000 | | 10.120.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 9.442.000 | 12 | 9.550.000 | 12 | 9.690.000 | 12 | 9.890.000 | 12 | 10.120.000 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan | Jumlah KK yang memiliki akses jamban layak (KK) | 2.745 | 2.765 | 2.785 | 10.800.000 | 2.805 | 10.920.000 | 2.825 | 11.085.000 | 2.845 | 11.315.000 | 2.865 | 11.580.000 | |
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 10.800.000 | | 10.920.000 | | 11.085.000 | | 11.315.000 | | 11.580.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 12 | 12 | 10.800.000 | 12 | 10.920.000 | 12 | 11.085.000 | 12 | 11.315.000 | 12 | 11.580.000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%) | 20 | 20 | 25 | 24.800.000 | 30 | 25.090.000 | 35 | 25.485.000 | 40 | 26.020.000 | 45 | 26.635.000 | |
| | Persentase Diabetes dalam pengendalian (%) | 15 | 15 | 17,5 | | 20 | | 22,5 | | 25 | | 27,5 | | |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%) | 106,75 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%) | 15 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 24.800.000 | | 25.090.000 | | 25.485.000 | | 26.020.000 | | 26.635.000 | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit tidak menular | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 98 | 100 | 100 | 24.800.000 | 100 | 25.090.000 | 100 | 25.485.000 | 100 | 26.020.000 | 100 | 26.635.000 | |
| | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 14,42 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kelompok usia penerima PKG tercapai > 80% dari populasi target (%) | N/A | 20 | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 1.000.000 | | 1.015.000 | | 1.035.000 | | 1.060.000 | | 1.085.000 | |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 10.208 | 10.594 | 17.669 | 1.000.000 | 17.655 | 1.015.000 | 17.641 | 1.035.000 | 17.627 | 1.060.000 | 17.613 | 1.085.000 | |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 1.400.000 | | 1.420.000 | | 1.445.000 | | 1.475.000 | | 1.510.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.026 | 3.262 | 4.132 | 1.400.000 | 4.194 | 1.420.000 | 4.257 | 1.445.000 | 4.321 | 1.475.000 | 4.386 | 1.510.000 | |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.925 | 1.344 | 1.344 | 2.000.000 | 1.345 | 2.025.000 | 1.345 | 2.060.000 | 1.345 | 2.105.000 | 1.346 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 2.000.000 | | 2.025.000 | | 2.060.000 | | 2.105.000 | | 2.155.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 447 | 661 | 662 | 2.000.000 | 662 | 2.025.000 | 663 | 2.060.000 | 664 | 2.105.000 | 664 | 2.155.000 | |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 18.400.000 | | 18.605.000 | | 18.885.000 | | 19.275.000 | | 19.730.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 62 | 61 | 62 | 18.400.000 | 63 | 18.605.000 | 64 | 18.885.000 | 65 | 19.275.000 | 67 | 19.730.000 | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 26.100.000 | | 32.890.000 | | 33.385.000 | | 34.075.000 | | 34.880.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%) | 0 | 75 | 80 | 26.100.000 | 85 | 32.890.000 | 90 | 33.385.000 | 95 | 34.075.000 | 100 | 34.880.000 | |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga Sehat (%) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4.000.000 | 25 | 4.060.000 | 30 | 4.145.000 | 35 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 | | 4.000.000 | | 4.060.000 | | 4.145.000 | | 4.245.000 | |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.060.000 | 4 | 4.145.000 | 4 | 4.245.000 | |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |
| Meningkatnya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu Mandiri (%) | 0 | 55 | 57,5 | 0 | 60 | 2.500.000 | 62,5 | 2.540.000 | 65 | 2.595.000 | 67,5 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi | | | | | 0 | | 2.500.000 | | 2.540.000 | | 2.595.000 | | 2.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.540.000 | 4 | 2.595.000 | 4 | 2.660.000 | |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 26.100.000 | | 26.390.000 | | 26.785.000 | | 27.335.000 | | 27.975.000 | |
| Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 0 | 12 | 15 | 26.100.000 | 18 | 26.390.000 | 21 | 26.785.000 | 24 | 27.335.000 | 27 | 27.975.000 | |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 26.100.000 | | 26.390.000 | | 26.785.000 | | 27.335.000 | | 27.975.000 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 4 | 4 | 26.100.000 | 4 | 26.390.000 | 4 | 26.785.000 | 4 | 27.335.000 | 4 | 27.975.000 | |

## 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

**Tabel 4.3**
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **1.02.0.00.0.00.00.0000 - Dinas Kesehatan** | | | | |
| 1. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Lanjutan | *1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | |
| | | | 1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas | |
| | | | 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | |
| | | | 1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit | |
| | | | 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | |
| | | Menguatnya sistem kesehatan | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| | | Meningkatnya kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Lanjutan | *1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | |
| 2. | 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan | *1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| 3. | 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Meningkatnya Penyediaan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang memenuhi persyaratan | *1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)* | |
| | | | 1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERA NGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **1.02.0.00.0.00.00.0001 - RSUD Waluyojati** | | | | |
| 4. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | *1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD* | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0002 - RSUD Tongas** | | | | |
| 5. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | *1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD* | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0003 - Puskesmas Kuripan** | | | | |
| 6. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | *1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD* | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 7. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0004 - Puskesmas Bantaran** | | | | |
| 8. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | *1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD* | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 9. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0005 - Puskesmas Leces** | | | | |
| 10. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | *1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD* | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 11. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERA NGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **1.02.0.00.0.00.00.0006 - Puskesmas Jorongan** | | | | |
| 12. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | *1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD* | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 13. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0007 - Puskesmas Tegalsiwalan** | | | | |
| 14. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | *1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD* | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 15. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0008 - Puskesmas Banyuanyar** | | | | |
| 16. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 17. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0009 - Puskesmas Klenang Kidul** | | | | |
| 18. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 19. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERA NGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **1.02.0.00.0.00.00.0010 - Puskesmas Tiris** | | | | |
| 20. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | *1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD* | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 21. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0011 - Puskesmas Ranugedang** | | | | |
| 22. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 23. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0012 - Puskesmas Krucil** | | | | |
| 24. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 25. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0013 - Puskesmas Wangkal** | | | | |
| 26. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 27. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERA NGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **1.02.0.00.0.00.00.0014 - Puskesmas Condong** | | | | |
| 28. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 29. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0015 - Puskesmas Pakuniran** | | | | |
| 30. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 31. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0016 - Puskesmas Glagah** | | | | |
| 32. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 33. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0017 - Puskesmas Kotaanyar** | | | | |
| 34. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 35. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERA NGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **1.02.0.00.0.00.00.0018 - Puskesmas Paiton** | | | | |
| 36. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 37. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0019 - Puskesmas Jabungsisir** | | | | |
| 38. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 39. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0020 - Puskesmas Besuk** | | | | |
| 40. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 41. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0021 - Puskesmas Bago** | | | | |
| 42. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 43. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERA NGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **1.02.0.00.0.00.00.0022 - Puskesmas Kraksaan** | | | | |
| 44. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 45. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0023 - Puskesmas Krejengan** | | | | |
| 46. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 47. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0024 - Puskesmas Pajarakan** | | | | |
| 48. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 49. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0025 - Puskesmas Maron** | | | | |
| 50. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 51. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERA NGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **1.02.0.00.0.00.00.0026 - Puskesmas Suko** | | | | |
| 52. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 53. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0027 - Puskesmas Gending** | | | | |
| 54. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 55. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0028 - Puskesmas Dringu** | | | | |
| 56. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 57. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0029 - Puskesmas Wonomerto** | | | | |
| 58. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 59. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERA NGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **1.02.0.00.0.00.00.0030 - Puskesmas Lumbang** | | | | |
| 60. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 61. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0031 - Puskesmas Tongas** | | | | |
| 62. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 63. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0032 - Puskesmas Curahtulis** | | | | |
| 64. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 65. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0033 - Puskesmas Sumberasih** | | | | |
| 66. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 67. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERA NGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **1.02.0.00.0.00.00.0034 - Puskesmas Sukapura** | | | | |
| 68. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 69. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| **1.02.0.00.0.00.00.0035 - Puskesmas Sumber** | | | | |
| 70. | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD | 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD | |
| | | | 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 71. | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular | *1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | |
| | | | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |

## 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

Setelah program, kegiatan, dan subkegiatan dirumuskan sebagai penjabaran dari sasaran strategis, langkah selanjutnya dalam kerangka perencanaan berbasis kinerja adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan sekumpulan indikator yang dianggap paling penting dan relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Penetapan IKU ini krusial untuk memastikan bahwa seluruh upaya dan sumber daya yang dialokasikan benar-benar fokus pada pencapaian hasil yang paling prioritas.

Tabel berikut menyajikan secara rinci daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan. Tabel ini dilengkapi dengan data awal (baseline) pada tahun 2024 sebagai titik pijak, serta target kuantitatif yang jelas dan terukur untuk setiap tahun dalam periode perencanaan hingga tahun 2030. Penetapan target ini menjadi komitmen kinerja dinas dan akan digunakan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel.

**Tabel 4.4**
**Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | Usia Harapan Hidup (UHH) | tahun | 73,93 | 74,13 | 74,38 | 74,63 | 74,89 | 75,14 | 75,39 | |
| 2. | Angka Kematian Ibu (AKI) | per 100.000 kelahiran hidup | 103,16 | 98,08 | 92,94 | 87,73 | 82,45 | 77,09 | 71,65 | |
| 3. | Angka Kematian Balita | Per 1.000 Kelahiran Hidup | 15,47 | 14,94 | 14,41 | 13,86 | 13,31 | 12,75 | 12,18 | |
| 4. | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | % | 26,3 | 22,28 | 21,48 | 20,68 | 19,88 | 17,14 | 16,42 | |
| 5. | Angka populasi bebas penyakit menular | % | 41,67 | 50 | 58,33 | 66,67 | 75 | 83,33 | 91,67 | |
| 6. | Angka populasi bebas penyakit tidak menular | % | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 7. | Proporsi fasyankes yang 80% | % | 97,14 | 97,14 | 94,44 | 94,44 | 100 | 100 | 100 | |
| 8. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

## 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam penyelenggaraan bidang urusan, pengukuran keberhasilan kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan dengan pelayanan masing-masing perangkat daerah. Tabel berikut menyajikan secara rinci daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan. Tabel ini dilengkapi dengan data awal (baseline) pada tahun 2024 sebagai titik pijak, serta target kuantitatif yang jelas dan terukur untuk setiap tahun dalam periode perencanaan hingga tahun 2030. Penetapan target ini menjadi komitmen kinerja dinas dan akan digunakan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel.

**Tabel 4.5**
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1. | Angka Kematian Ibu (AKI) | negatif | per 100.000 kelahiran hidup | 103,16 | 98,08 | 92,94 | 87,73 | 82,45 | 77,09 | 71,65 | |
| 2. | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | negatif | % | 26,3 | 22,28 | 21,48 | 20,68 | 19,88 | 17,14 | 16,42 | |
| 3. | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) | positif | % | 79,1 | 82 | 85 | 90 | 95 | 97 | 98 | |
| 4. | Persentase cakupan JKN | positif | % | 99,42 | 99,45 | 99,48 | 99,51 | 99,54 | 99,58 | 99,60 | |
| 5. | Angka Kematian Balita | negatif | Per 1.000 Kelahiran Hidup | 15,47 | 14,94 | 14,41 | 13,86 | 13,31 | 12,75 | 12,18 | |
| 6. | Angka populasi bebas penyakit menular | positif | % | 41,67 | 50 | 58,33 | 66,67 | 75 | 83,33 | 91,67 | |
| 7. | Angka populasi bebas penyakit tidak menular | positif | % | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 8. | Proporsi fasyankes yang 80% | komulatif | % | 97,14 | 97,14 | 94,44 | 94,44 | 100 | 100 | 100 | |
| 9. | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10. | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | positif | % | 98,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 11. | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | positif | % | 92,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12. | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 13. | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14. | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 15. | Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | positif | % | 79,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 16. | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 17. | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 18. | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | positif | % | 91,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 19. | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar | positif | % | 93,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 20. | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | positif | % | 97,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

# BAB 5
# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Kesehatan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 26 September 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**dr. HARIAWAN DWI TAMTOMO, M.M.Kes**
Pembina Tingkat I
NIP. 19710422 200212 1 002

PEMERINTAH
KABUPATEN
PROBOLINGGO

endless probolinggo

*Rancangan Akhir*

# RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

### KABUPATEN PROBOLINGGO

https://pupr.probolinggokab.go.id/ Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo https://pupr.probolinggokab.go.id/siprenjakmas/public/

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 - 2029 berisikan penjabaran mengenai tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029, yang secara keseluruhan berisikan tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029.

Diharapakan Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pedoman operasional bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo, serta menjadi masukan bagi instansi terkait dalam harmonisasi jalinan tugas koordinasi.

Probolinggo, 29 September 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**HENGKI CAHJO SAPUTRA, ST, MM.**
**Pembina Tk. 1**
**NIP. 19741007 200312 1 004**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
DAFTAR GRAFIK ..... vi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Landasan Hukum ..... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ..... 7
1.4. Sistematika Penulisan ..... 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 10
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 11
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 11
2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 12
2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 12
2.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 13
2.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 13
2.1.7. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 14
2.1.8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 14
2.1.9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Jasa konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 15
2.1.10. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 16
2.1.11. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Penyelenggaraan Jalan dan SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 16
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 16
2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 17

2.2.2. Sarana dan Prasarana Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 25
2.4. Kelompok Sasaran Layanan ..... 29
2.5. Tantangan dan Peluang ..... 30
2.5.1. Tantangan ..... 30
2.5.2. Peluang ..... 30
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ..... 31
2.6.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ..... 31
2.6.2. Isu Strategis Perangkat Daerah ..... 34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 49
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ..... 49
3.2. Definisi Operasional ..... 53
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ..... 55
3.3.1. Strategi Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029. ..... 56
3.3.2. Lokus Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 58
3.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029..... 58
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARANAN BIDANG URUSAN ..... 61
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan ..... 61
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ..... 105
BAB V PENUTUP ..... 109

# DAFTAR TABEL

**Tabel 2.1.** Data Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 18
**Tabel 2.2.** Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 48

**Tabel T-C.21.** Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 27
**Tabel T-C.22.** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 28

**Tabel 3.1.** Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 52
**Tabel 3.2.** Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 57
**Tabel 3.3.** Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 59

**Tabel 4.1.** Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 - 2029 ..... 62
**Tabel 4.2.** Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 79
**Tabel 4.3.** Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 105
**Tabel 4.4.** Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 106
**Tabel 4.5.** Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 107

# DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1.1.** Hubungan antar Dokumen Perencanaan ..... 2

**Gambar 2.1** Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 10
**Gambar 2.2** Peta Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 32

**Gambar 3.1.** Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo ..... 49
**Gambar 3.2.** Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 4 (empat) Kabupaten Probolinggo ..... 50
**Gambar 3.3.** Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 51
**Gambar 3.4.** Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo .. 53
**Gambar 3.5.** Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo .. 54
**Gambar 3.6.** Definisi Operasional Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ..... 55

# DAFTAR GRAFIK

**Grafik 2.1.** Data Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Pekerjaan ..... 17
**Grafik 2.2.** Data Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin ..... 17
**Grafik 2.3.** Data Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 18

# BAB I
# PENDAHULUAN

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terbagi menjadi 3 dokumen perencanaan yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus terkait/ terhubung satu sama lain. Dokumen perencanaan suatu daerah juga harus mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah level Provinsi dan Nasional sehingga pembangunan seluruh daerah terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun (jangka menengah) yang disusun dan identik dengan rencana realiasasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mendukung visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Probolinggo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas dan fungsinya menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029, hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 272 yaitu perangkat daerah diharuskan menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo. Selain itu, juga berkontribusi dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo terdapat proses yang harus ditempuh yaitu, dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan Undang – undang Nomor 24 tahun 2004 yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah akan terkait dengan dokumen perencanaan tingkat daerah serta dengan dokumen perencanaan pemerintah tingkat Nasional. Juga dijelaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 bahwa hubungan antara dokumen Renstra OPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**
Hubungan antar Dokumen Perencanaan

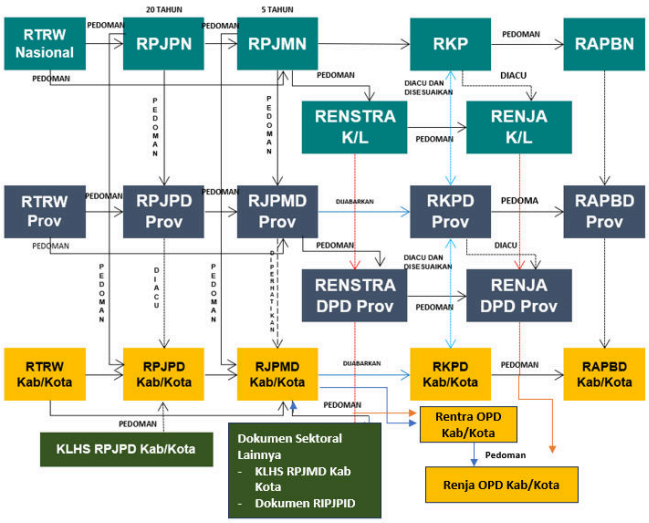


***Sumber:*** *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025*

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 - 2029 harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten

Probolinggo tahun 2025 – 2029, RPJPD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2045, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 – 2029, dan RPJMN tahun 2025 – 2029.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (LembaranmNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023 – 2043; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029.
34. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 memiliki maksud untuk dijadikan arah atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo dalam mendukung RPJMD Kabupaten Probolinggo.

Adapun tujuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penjabaran terkait arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah;
2. Memberikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu 5 tahun;
3. Menyediakan tolak ukur kinerja terkait program dan kegiatan perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, dan kelompok sasaran pelayanan serta memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Agraria dan Tata Runag; Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Propinsi Jawa Timur; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Probolinggo dan penentuan isu – isu strategis.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo beserta indikator kinerjanya serta dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun mendatang.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo serta dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo Daerah dalam tiga tahun mendatang, tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Probolinggo.

# BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pelayanan Perangkat Daerah merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu instansi pada tingkat Kabupaten/ Kota untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan pelayanan yang baik, diharapkan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya, meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi yang tercantum dalam Lampiran IV Perbup Probolinggo Nomor 14 tahun 2022 dapat dilihat pada *Gambar 2.1* sebagai berikut:

**Gambar 2.1**
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo

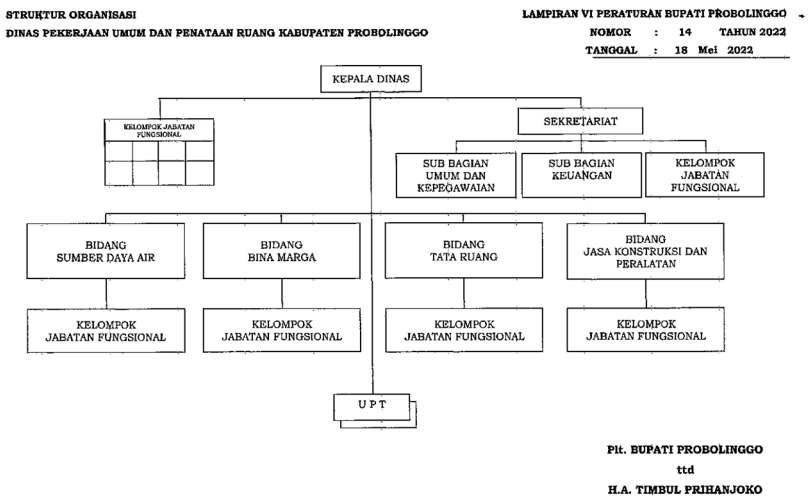


***Sumber:*** *Lampiran IV Perbub Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022*

Berdasarkan Gambar diatas, susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari, Kepala Dinas, Sekretariat, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu, Bidang Sumber Daya Air yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Bina Marga yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Tata Ruang yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, selain itu ada juga Kelompok Jabatan Fungsional serta UPT.

### 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan dalam tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksana kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksana evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksana administrasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan sebagai pembina terhadap Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional, dan UPT. Selain itu, Kepala Dinas juga memiliki fungsi sebagai pembina, pengkoordinasi, pengendali dan pemfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang, serta jasa konstruksi dan peralatan, juga pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan. Dan dalam tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasi dan penyusun, pembina, pemantau, pengevaluasi rencana program dan kegiatan, selain itu sebagai penyiap bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi, juga sebagai pemantau, pengevaluasi dan pelapor

pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun fungsi lainnya yakni pengkoordinasi, pembina dan pengendali penataan organisasi dan tatalaksana, juga sebagai pembina, pemberi dukungan dan pengawas administrasi umum meliputi, ketatausahaan, kepegawaian, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah/ negara, kearsipan dan dokumentasi. Selain itu sebagai penyusun, pelaksana, pengorganisasi, pemantau dan pengevaluasi Standart Operasional Prosedur (SOP), serta sebagai pengkoordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas untuk mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian. Dan dalam tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki fungsi sebagai penyiap bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian, pengelolaan penatausahaan, pendistribusian serta pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah. Setelah itu, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian juga memiliki fungsi sebagai penyusun dan pengelola pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi. Juga sebagai penyusunan dan pengelola administrasi kepegawaian serta peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, sebagai penyiap bahan data kelembagaan, analisa jabatan, bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, serta sebagai pelaksana pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian, juga pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas untuk menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan. Dan dalam tugasnya, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki fungsi sebagai penyiap bahan rumusan kebijakan teknis dibidang keuangan,

pengelola administrasi keuangan, pelaksana pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan, penyiap bahan verifikasi dan pembukaan, penyusun bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, pelaksana monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 2.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai penyedia bahan administrasi rencana program/ kegiatan/ anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusun administrasi rencana program/ kegiatan/ anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pelaksana pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana program/ kegiatan/ anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan juga sebagai pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 2.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan teknis serta koordinasi dan fasilitasi teknis pembangunan dan pengendalian Sumber Daya Air, Operasi, Pemeliharaan, dan Pengembangan Irigasi, Air Baku dan Bina Manfaat sarana prasarana dibidang Sumber Daya Air. Dan dalam tugasnya, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai pelaksana perumusan perencanaan teknis, rekomendasi teknis, fasilitasi kebijakan teknis, dan strategi teknis, serta sebagai pelaksana pembinaan, penelitian/ investigasi, pembangunan, rehabilitasi/ pemeliharaan, dan peningkatan teknis Pembangunan dan Pengendalian Sumber Daya Air, Operasi, Pemeliharaan, dan Pengembangan Irigasi, Air Baku dan Bina Manfaat sarana prasarana dibidang Sumber Daya Air. Selain itu Kepala Bidang Sumber Daya Air, berfungsi sebagai pelaksana pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan teknis, serta pelaksana fasilitasi diseminasi peraturan perundang – undangan kebijakan strategis, program dan Norma Standart Pedoman dan Manual (NSPM) dan Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) teknis Pembangunan dan Pengendalian Sumber Daya Air, Operasi, Pemeliharaan,

dan Pengembangan Irigasi, Air Baku dan Bina Manfaat sarana prasarana dibidang Sumber Daya Air. Dan Kepala Bidang Sumber Daya Air juga memiliki fungsi sebagai, penyusun, pelaksana, pengorganisasian dan evaluasi Standart Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang, serta pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 2.1.7. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Perencanaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan dibidang Bina Marga. Dan dalam tugasnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai pelaksana perumusan perencanaan teknis, rekomendasi teknis, fasilitasi kebijakan teknis dan strategi teknis, serta sebagai pelaksana pembinaan dan penelitian teknis, pelaksana pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan teknis Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Perencanaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan dibidang Bina Marga. Selain itu, Kepala Bidang Bina Marga juga berfungsi sebagai pelaksana fasilitasi diseminasi peraturan perundang – undangan kebijakan strategis, program dan Norma Standart Pedoman dan Manual (NSPM) dan Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) teknis Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Perencanaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan dibidang Bina Marga, juga sebagai penyusun, pelaksana, pengorganisasian dan evaluasi Standart Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang, serta pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 2.1.8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang dibidang tata ruang. Dan dalam tugasnya, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan teknis, pelaksana pembinaan, koordinasi dan fasilitasi serta penyelenggara perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dibidang tata ruang. Selain itu, Kepala Bidang Tata Ruang juga berfungsi sebagai pelaksana fasilitasi diseminasi peraturan perundang – undangan kebijakan strategis, program dan Norma Standart Pedoman dan Manual (NSPM) dan Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dibidang tata ruang, juga sebagai penyusun, pelaksana, pengorganisasian dan evaluasi Standart Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang, serta pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 2.1.9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Jasa konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Bidang Jasa konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bina jasa konstruksi, alat berat dan laboratorium konstruksi, monitoring, evaluasi dan pelaporan jasa konstruksi dibidang jasa konstruksi dan peralatan. Dan dalam tugasnya, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis serta pemberdayaan terhadap lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah dan asosiasi jasa konstruksi dibidang jasa konstruksi dan peralatan. Penyedia dan fasilitasi alat berat dan laboratorium konstruksi dibidang jasa konstruksi dan peralatan. Selain itu, Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan juga berfungsi sebagai pelaksana fasilitasi diseminasi peraturan perundang – undangan kebijakan strategis, program dan Norma Standart Pedoman dan Manual (NSPM) dan Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) teknis dibidang jasa konstruksi dan peralatan, serta pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan jasa konstruksi dibidang jasa konstruksi dan peralatan, juga sebagai penyusun, pelaksana, pengorganisasian dan evaluasi Standart

Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang, serta pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 2.1.10. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan bertugas untuk membantu tenaga administrator dalam menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing – masing pengelompokan uraian fungsi. Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### 2.1.11. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Penyelenggaraan Jalan dan SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

UPT Penyelenggaraan Jalan dan SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi serta uraian tugas dan fungis UPT sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 188 ayat (1) huruf h, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya merupakan aset penting bagi suatu perangkat daerah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Semakin berkualitas sebuah sumber daya maka semakin efektif dan efisien suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, begitu juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memiliki sumber daya, baik berupa Sumber Daya Manusia (SDM), aset/ modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu bagian penting yang dapat mendukung sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berjalan dengan baik, karena kualitas dan kuantitas yang dimiliki sebuah OPD dapat menentukan capaian kinerja yang dilaksanakan. Berdasarkan data kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo memiliki total 227 orang.

**Grafik 2.1.**
Data Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Pekerjaan

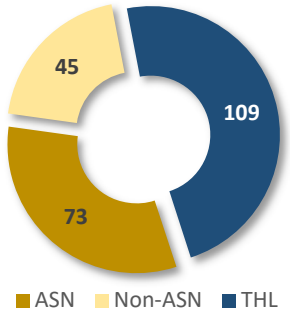


***Sumber:*** *Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

Berdasarkan jenis pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didominasi oleh Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 109 orang.

**Grafik 2.2.**
Data Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

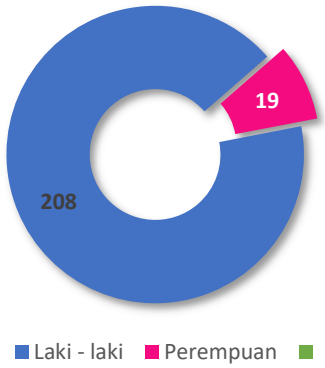


***Sumber:*** *Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didominasi oleh tenaga kerja laki – laki sebanyak 208 orang.

**Grafik 2.3.**
Data Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan

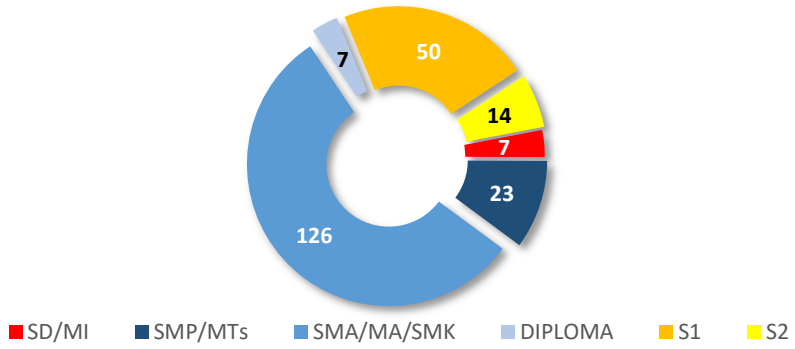


***Sumber:*** *Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

Dan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didominasi oleh tenaga kerja tamatan SMA/MA/SMK sederajat sebanyak 126 orang.

Berdasarkan data diatas, secara keseluruhan perlu adanya peningkatan kualitas SDM yang memumpuni, agar dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjalan secara optimal.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tidak kalah pentingnya dari SDM, yakni sarana dan prasarana operasional baik didalam kantor maupun dilapangan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan baik, juga dapat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi sebuah organisasi. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya sebaik mungkin dalam memenuhi sarana dan prasarana operasional agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan optimal.

**Tabel 2.1.**
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo

| No. | Kategori | Satuan | Jumlah | Nilai (Rp) | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Split | Unit | 24 | Rp | 205.085.318 | |
| 2 | AC Window | Unit | 33 | Rp | 150.534.564 | |
| 3 | Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya (dst) | Unit | 11 | Rp | 283.331.000 | |
| 4 | Alat Komunikasi Lainnya | Unit | 2 | Rp | 27.700.000 | |

| No. | Kategori | Satuan | Jumlah | Nilai (Rp) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia Lain-Lain | Unit | 5 | Rp 92.250.000 | |
| 6 | Alat Laboratorium Bahan Bangunan Kontruksi Lain-Lain | Unit | 2 | Rp 5.700.000 | |
| 7 | Alat Pembantu Kebakaran | Unit | 3 | Rp 4.162.500 | |
| 8 | Alat Pembersih Lain-lain | Unit | 9 | Rp 59.000.000 | |
| 9 | Alat Pemeriksa Beton | Unit | 2 | Rp 129.000.000 | |
| 10 | Alat Penghancur Kertas | Unit | 15 | Rp 79.761.000 | |
| 11 | Alat Penguji Daya Tembus Air | Unit | 1 | Rp 121.700.000 | |
| 12 | Alat Uji Diameter | Unit | 3 | Rp 2.100.000 | |
| 13 | Alat Ukur Ketegaklurusan | Unit | 1 | Rp 4.400.000 | |
| 14 | ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) | Unit | 318 | Rp 256.071.000 | |
| 15 | Angkutan Barang Lain-lain | Unit | 1 | Rp 278.790.903 | |
| 16 | Asphalt Density Recorder | Unit | 1 | Rp 16.400.000 | |
| 17 | Audio Visual | Unit | 1 | Rp 49.500.000 | |
| 18 | Brand Kas | Unit | 20 | Rp 55.003.000 | |
| 19 | Buldozer | Unit | 2 | Rp 653.210.000 | |
| 20 | Camera + Attachment | Unit | 1 | Rp 1.600.000 | |
| 21 | Camera Digital | Unit | 4 | Rp 27.000.000 | |
| 22 | Camera Electronic | Unit | 3 | Rp 17.468.500 | |
| 23 | Camera Film | Unit | 2 | Rp 19.850.000 | |
| 24 | Camera Video | Unit | 15 | Rp 106.761.600 | |
| 25 | CCTV - Camera Control Television System | Unit | 5 | Rp 61.149.600 | |
| 26 | Concrete Breaker | Unit | 1 | Rp 22.110.000 | |
| 27 | Concrete Cutter | Unit | 1 | Rp 14.503.000 | |
| 28 | Concrete Vibrator | Unit | 1 | Rp 29.700.000 | |
| 29 | Concrette Hammer Set | Unit | 3 | Rp 14.900.000 | |

| No. | Kategori | Satuan | Jumlah | Nilai (Rp) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Core Hardness Tester | Unit | 1 | Rp 44.100.000 | |
| 31 | Crawler Excavator + Attachment | Unit | 2 | Rp 2.675.040.000 | |
| 32 | Destilasi Aspal | Unit | 1 | Rp 12.800.000 | |
| 33 | Dispenser | Unit | 2 | Rp 3.000.000 | |
| 34 | Distilasi | Unit | 1 | Rp 12.800.000 | |
| 35 | Drill Machine | Unit | 13 | Rp 261.950.000 | |
| 36 | Drilling | Unit | 3 | Rp 144.350.000 | |
| 37 | Drying Oven | Unit | 1 | Rp 24.250.000 | |
| 38 | Dump Truck | Unit | 1 | Rp 329.000.000 | |
| 39 | External/ Portable Hardisk | Unit | 34 | Rp 65.538.875 | |
| 40 | Filing Cabinet Besi | Unit | 19 | Rp 10.482.244 | |
| 41 | Filling Besi/Metal | Unit | 9 | Rp 22.000.000 | |
| 42 | Focusing Screen/ Layar LCD Projector | Unit | 11 | Rp 25.118.850 | |
| 43 | Genset | Unit | 6 | Rp 148.461.300 | |
| 44 | Gergaji Chain Saw | Unit | 14 | Rp 111.760.000 | |
| 45 | Gerobak Dorong | Unit | 27 | Rp 22.691.000 | |
| 46 | Global Positioning System | Unit | 25 | Rp 507.679.800 | |
| 47 | Gordyin/ Kray | Unit | 1 | Rp 28.560.000 | |
| 48 | Guardrail | Unit | 361 | Rp 777.955.000 | |
| 49 | Handtruck Troly Plastics | Unit | 3 | Rp 3.118.500 | |
| 50 | Handy Cam | Unit | 2 | Rp 15.490.000 | |
| 51 | Handy Talky (HT) | Unit | 53 | Rp 81.505.000 | |
| 52 | Hard Disk | Unit | 1 | Rp 2.230.000 | |
| 53 | Hard disk Eksternal | Unit | 33 | Rp 45.515.875 | |
| 54 | Infrared Thermometer | Unit | 3 | Rp 5.940.000 | |

| No. | Kategori | Satuan | Jumlah | Nilai (Rp) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Jack CBR | Unit | 1 | Rp 27.500.000 | |
| 56 | Jangka Berkaki | Unit | 2 | Rp 2.350.000 | |
| 57 | Jeep | Unit | 3 | Rp 166.000.000 | |
| 58 | Kamera Udara | Unit | 1 | Rp 23.350.000 | |
| 59 | Kapal Motor | Unit | 1 | Rp 39.221.627 | |
| 60 | Kipas Angin | Unit | 28 | Rp 3.519.908 | |
| 61 | Kompor Gas (Alat Dapur) | Unit | 1 | Rp 850.000 | |
| 62 | Kursi Kayu | Unit | 70 | Rp 1.307.750 | |
| 63 | Kursi Kerja | Unit | 100 | Rp 79.837.869 | |
| 64 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | Unit | 3 | Rp 19.340.000 | |
| 65 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Unit | 14 | Rp 64.788.000 | |
| 66 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | Unit | 36 | Rp 96.762.000 | |
| 67 | Kursi Kerja Pejabat Eselon V | Unit | 8 | Rp 39.200.000 | |
| 68 | Kursi Lipat | Unit | 86 | Rp 13.305.294 | |
| 69 | Kursi Putar | Unit | 7 | Rp 2.675.691 | |
| 70 | Kursi Rapat | Unit | 328 | Rp 161.948.500 | |
| 71 | Kursi Rapat Pejabat Lain-Lain | Unit | 14 | Rp 7.084.000 | |
| 72 | Kursi Tamu | Unit | 15 | Rp 56.946.351 | |
| 73 | lain-lain Alat Dapur | Unit | 1 | Rp 4.700.000 | |
| 74 | Lain-lain Alat Komunikasi Radio HF/ FM | Unit | 4 | Rp 236.810.000 | |
| 75 | Lain-Lain Alat Laboratorium lain (Alat Tes HbA1C) | Unit | 2 | Rp 6.000.000 | |
| 76 | Lain-lain Alat Ukur Lainnya (Hammer Test) | Unit | 1 | Rp 2.760.000 | |
| 77 | Lain-lain Alat Ukur Universal | Unit | 11 | Rp 25.594.600 | |
| 78 | Lain-lain Excavator | Unit | 2 | Rp 1.808.935.097 | |
| 79 | Lain-lain Meja Kerja Pejabat | Unit | 3 | Rp 9.900.000 | |

| No. | Kategori | Satuan | Jumlah | Nilai (Rp) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Lain-Lain Mini Komputer | Unit | 3 | Rp 3.360.000 | |
| 81 | Lain-Lain Peralatan Olahraga Lainnya | Unit | 4 | Rp 32.000.000 | |
| 82 | Lain-lain Unit Pemeliharaan Lapangan | Unit | 1 | Rp 9.900.000 | |
| 83 | Lampu | Unit | 7 | Rp 3.171.000 | |
| 84 | Laptop | Unit | 143 | Rp 1.848.987.638 | |
| 85 | Layar Film/ Projector | Unit | 17 | Rp 143.316.221 | |
| 86 | LCD Projector/ Infocus | Unit | 2 | Rp 16.000.000 | |
| 87 | Lemari Besi/ Metal | Unit | 51 | Rp 106.219.750 | |
| 88 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | Unit | 16 | Rp 58.715.000 | |
| 89 | Lemari Es | Unit | 2 | Rp 6.500.000 | |
| 90 | Lemari Kaca | Unit | 8 | Rp 25.725.781 | |
| 91 | Lemari Kayu | Unit | 38 | Rp 66.609.933 | |
| 92 | Lightweight Concrete Test Hammer | Unit | 2 | Rp 11.000.000 | |
| 93 | Loudspeaker | Unit | 1 | Rp 4.000.000 | |
| 94 | Meja 1/2 Biro | Unit | 5 | Rp 11.229.000 | |
| 95 | Meja Kerja Kayu | Unit | 156 | Rp 91.036.913 | |
| 96 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | Unit | 2 | Rp 24.130.000 | |
| 97 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | Unit | 12 | Rp 46.200.000 | |
| 98 | Meja Ketik | Unit | 1 | Rp 100.000 | |
| 99 | Meja Komputer | Unit | 2 | Rp 137.500 | |
| 100 | Meja Panjang | Unit | 1 | Rp 700.000 | |
| 101 | Meja Rapat | Unit | 18 | Rp 81.370.000 | |
| 102 | Meja Rapat Pejabat Eselon II | Unit | 13 | Rp 459.391 | |
| 103 | Mesin Absensi | Unit | 11 | Rp 108.538.400 | |
| 104 | Mesin Bor Beton | Unit | 1 | Rp 25.000.000 | |

| No. | Kategori | Satuan | Jumlah | Nilai (Rp) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) | Unit | 12 | Rp 6.660.000 | |
| 106 | Mesin Pemotong Rumput | Unit | 55 | Rp 117.599.476 | |
| 107 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | Unit | 2 | Rp 1.900.000 | |
| 108 | Microphone/Wireless MIC | Unit | 3 | Rp 11.318.200 | |
| 109 | Monitor | Unit | 2 | Rp 2.530.000 | |
| 110 | Multi Purpose Vehicle (MPV) | Unit | 2 | Rp 502.000.000 | |
| 111 | Noise & Distortion Meter | Unit | 4 | Rp 19.000.000 | |
| 112 | Note Book | Unit | 1 | Rp 5.672.139 | |
| 113 | P.C Unit | Unit | 63 | Rp 556.346.999 | |
| 114 | Pan Mixer | Unit | 2 | Rp 10.340.000 | |
| 115 | Papan Nama Instansi | Unit | 2 | Rp 11.000.000 | |
| 116 | Papan Visual/Papan Nama | Unit | 32 | Rp 68.699.000 | |
| 117 | Penetrasi Asphalt (Universal Penetrometer) | Unit | 1 | Rp 14.800.000 | |
| 118 | Perahu Penumpang | Unit | 2 | Rp 23.000.000 | |
| 119 | Peralatan Las Listrik | Unit | 1 | Rp 2.750.000 | |
| 120 | Peralatan Pemetaan Pengukur Lain-Lain | Unit | 1 | Rp 34.996.500 | |
| 121 | Perkakas Bengkel Kayu | Unit | 9 | Rp 2.178.607.100 | |
| 122 | PH Meter | Unit | 24 | Rp 213.960.000 | |
| 123 | Pick Up | Unit | 4 | Rp 891.760.000 | |
| 124 | Pita Ukuran (Meteran) | Unit | 6 | Rp 3.135.000 | |
| 125 | Pompa Air | Unit | 5 | Rp 103.965.000 | |
| 126 | Portable Generating Set | Unit | 1 | Rp 9.800.000 | |
| 127 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Unit | 199 | Rp 780.549.584 | |
| 128 | Professional Sound System | Unit | 2 | Rp 30.000.000 | |
| 129 | Rak Besi | Unit | 17 | Rp 51.075.923 | |

| No. | Kategori | Satuan | Jumlah | Nilai (Rp) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Rak Kayu | Unit | 2 | Rp 7.000.000 | |
| 131 | Rak Piring Alumunium | Unit | 1 | Rp 2.000.000 | |
| 132 | Rambu Papan Tambahan | Unit | 61 | Rp 120.780.000 | |
| 133 | Rambu-rambu Larangan | Unit | 204 | Rp 338.329.966 | |
| 134 | Rambu-rambu Wajib | Unit | 35 | Rp 72.750.000 | |
| 135 | Rol Meter | Unit | 11 | Rp 7.850.000 | |
| 136 | Sand Equivalent | Unit | 1 | Rp 55.000.000 | |
| 137 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | Unit | 7 | Rp 62.610.875 | |
| 138 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | Unit | 22 | Rp 114.352.600 | |
| 139 | Scanner Facsimile | Unit | 2 | Rp 9.475.000 | |
| 140 | Schimdt Hammer | Unit | 2 | Rp 14.000.000 | |
| 141 | Seket Mat | Unit | 2 | Rp 2.000.000 | |
| 142 | Semi Trailer | Unit | 1 | Rp 535.500.000 | |
| 143 | Sepeda Motor | Unit | 50 | Rp 1.052.011.650 | |
| 144 | Slump Test Set | Unit | 2 | Rp 6.900.000 | |
| 145 | Sofa | Set | 2 | Rp 14.090.000 | |
| 146 | Sound System | Unit | 11 | Rp 50.000.000 | |
| 147 | Stamper | Unit | 3 | Rp 52.795.000 | |
| 148 | Station Wagon | Unit | 7 | Rp 968.904.014 | |
| 149 | Tandam Roller | Unit | 2 | Rp 452.680.000 | |
| 150 | Tang | Unit | 82 | Rp 771.125.000 | |
| 151 | Telephone Hybrid | Unit | 2 | Rp 3.725.000 | |
| 152 | Televisi | Unit | 12 | Rp 338.411.486 | |
| 153 | Temperature Indicator | Unit | 4 | Rp 10.000.000 | |
| 154 | Termometer Standar | Unit | 2 | Rp 2.000.000 | |

| No. | Kategori | Satuan | Jumlah | Nilai (Rp) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Theodolit | Unit | 1 | Rp 124.300.000 | |
| 156 | Timbangan Elektronik | Unit | 1 | Rp 5.700.000 | |
| 157 | Triaxal CBR | Unit | 1 | Rp 38.250.000 | |
| 158 | Truck + Attachment | Unit | 3 | Rp 5.460.000.000 | |
| 159 | Unit Tranceiver HF Stationery | Unit | 2 | Rp 7.700.000 | |
| 160 | Unit Tranceiver HF Transportable | Unit | 2 | Rp 7.150.000 | |
| 161 | Unit Tranceiver UHF Portable | Unit | 1 | Rp 902.500 | |
| 162 | Vibration Roller | Unit | 1 | Rp 895.000.000 | |
| 163 | Water Filter | Unit | 1 | Rp 59.015.000 | |
| 164 | Water Pass | Unit | 1 | Rp 3.905.000 | |
| 165 | Wheel Excavator + Attachment | Unit | 1 | Rp 1.207.994.000 | |
| 166 | White Board | Unit | 1 | Rp 3.350.000 | |
| 167 | Yeengler/Trailer | Unit | 1 | Rp 1.230.500.000 | |
| **JUMLAH** | | **Unit** | **3375** | **Rp 33.554.693.656** | |

***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

Dari data sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo kurang lebih terdapat 3375 unit dengan nilai total Rp.33.554.693.656,-.

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo, digambarkan melalui pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu pencapaian pada tahun 2020 – 2024. Terdapat 5 indikator kinerja yang menjadi sasaran dari renstra dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten probolinggo yaitu:

1. Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah
2. Persentase Peningkatan Bangunan Irigasi Kondisi Baik
3. Persentase Peningkatan Kondisi Jalan Mantap

4. Persentase Peningkatan Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi
5. Persentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dari 5 indikator tersebut dapat dilihat pencapaian kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam Tabel T-C.23. serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Tabel T-C24.

**Tabel T-C.23.**
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Probolinggo

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | - | - | - | 70,49 | 75,15 | 75,26 | 78,65 | 84,00 | 70,49 | 75,15 | 75,26 | 78,65 | 79,10 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,17% |
| 2 | Persentase Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik | - | - | - | 44,00 | 45,00 | 47,00 | 47,81 | 48,73 | 46,61 | 47,64 | 47,00 | 47,81 | 48,99 | 105,93% | 105,87% | 100,00% | 100,00% | 100,53% |
| 3 | Persentase Peningkatan Kondisi Jalan Mantap | - | - | - | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 77,33 | 71,77 | 79,38 | 83,58 | 77,33 | 79,56 | 73,08 | 115,04% | 119,40% | 108,92% | 102,88% | 101,83% |
| 4 | Persentase Nilai Bobot Capaian SIPJAKI | - | - | - | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 37,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,37% |
| 5 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang | - | - | - | 7,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 7,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% |

***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

**Tabel T-C.24.**
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Probolinggo

| Uraian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata - rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | 2.415.960.257 | 15.814.906.608 | 19.022.845.741 | 7.138.904.710 | 1.551.424.621 | 2.282.925.338 | 14.900.320.640 | 7.713.428.186 | 16.252.657.289 | 19.814.874.378 | 94,49% | 94,22% | 93,12% | 94,83% | 91,94% | 147,68% | 146,31% |
| Persentase Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik | 15.291.924.970 | 18.774.289.426 | 20.870.266.662 | 8.026.762.100 | 15.984.122.700 | 14.684.040.575 | 6.671.168.090 | 17.028.434.037 | 7.442.067.242 | 13.901.844.378 | 96,02% | 88,80% | 81,59% | 92,72% | 86,97% | 17,88% | 11,55% |
| Persentase Peningkatan Kondisi Jalan Mantap | 75.974.545.823 | 65.107.033.886 | 95.958.211.032 | 72.416.218.293 | 91.661.660.942 | 73.779.869.143 | 42.852.067.807 | 75.971.633.813 | 63.685.459.774 | 79.219.975.440 | 97,11% | 65,82% | 79,17% | 87,94% | 86,43% | 8,78% | 10,90% |
| Persentase Nilai Bobot Capaian SIPJAKI | 606.745.000 | 136.150.000 | 292.741.000 | 277.000.000 | 510.315.000 | 597.883.261 | 132.559.936 | 289.828.803 | 275.100.652 | 508.855.533 | 98,54% | 97,36% | 99,01% | 99,31% | 99,71% | 29,08% | 30,18% |
| Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang | 1.202.574.020 | 1.047.641.200 | 1.354.208.000 | 1.219.437.500 | 629.786.900 | 1.114.064.930 | 909.111.935 | 829.091.765 | 1.002.750.651 | 589.684.201 | 92,64% | 86,78% | 61,22% | 82,23% | 93,63% | -10,48% | -11,86% |

***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

Dari Tabel T-C.23. dapat dilihat untuk pencapaian target yang telah ditentukan dengan realisasinya dari tahun 2020 hingga 2023 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2024 terdapat 3 sasaran tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, yaitu pertama pada indikator sasaran Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah dengan target 84% hanya tercapai sebesar 79,10% hal ini dikarenakan target yang dicantumkan terlalu tinggi tanpa melihat peningkatan pada tahun – tahun sebelumnya. Kedua pada sasaran Persentase Nilai Bobot Capaian SIPJAKI dengan target 38% hanya tercapai sebesar 37% hal ini disebakan karena kurangnya pengumpulan beberapa data yang diperlukan sebagai dasar penilaian. Dan yang ketiga pada sasaran persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan target 24% hanya tercapai 20%, angka ini bisa dikatakan tidak terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya karena terkendala proses verifikasi dengan kementerian ATR/ BPN yang mengalami penundaan.

Dilihat dari Tabel T-C.24. diatas, rata – rata rasio realisasi anggaran dengan anggaran yang telah diberikan mencapai 89,66%. Dari rata – rata tersebut bisa dikatakan penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo baik. Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi hasil tersebut salah satunya dengan manajemen waktu, sumber daya yang ada, serta kerja sama antar bidang yang baik.

## 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo secara umum ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas infrastruktur yang dikelola (dibangun, ditingkatkan, dan dipelihara) baik infrastruktur jalan maupun irigasi, serta dalam hal penataan ruang dan pelayanan jasa konstruksi dan peralatan. Kelompok sasaran pembangunan infrastruktur diharapkan tersebar secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Probolinggo melalui program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disesuaikan dengan isu – isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada upaya – upaya pencapaian sasaran pembangunan yang memiliki dampak besar, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Namun perlu disadari bahwa kebutuhan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jauh lebih besar daripada kemampuan kuangan daerah Kabupaten Probolinggo, sehingga untuk memenuhi pembangunan infrastruktur pada wilayah Kabupaten Probolinggo diperlukan dana bantuan baik dari pihak swasta maupun dari APBD provinsi, DAK Kementerian atau Lembaga, dan APBN.

## 2.5. Tantangan dan Peluang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo memiliki faktor internal dan eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang. Diharapkan dalam menghadapi tantangan dan peluang ini dapat menjadikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo lebih baik lagi kedepannya.

### Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapat beberapa akses jalan kewenangan kabupaten yang masih mengalami kerusakan (kondisi rusak ringan dan berat) dibeberapa wilayah;
b. Kondisi jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah dan menjadi kewenangan Kabupaten dibeberapa tempat kurang layak, sehingga berpotensi terputusnya akses antar wilayah;
c. Upaya peningkatan kualitas infrastruktur tidak sejalan dengan ketersediaan anggaran daerah;
d. Terdapat aktifitas pengambilan air secara ilegal yang mengakibatkan kurang tercukupinya kebutuhan air irigasi;
e. Menurunnya tingkat partisipasi IHIPPA/ HIPPA/ GHIPPA dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi;
f. Masih rendahnya pemahaman penyedia jasa konstruksi terkait pentingnya melakukan uji material konstruksi;
g. Adanya penetapan Peraturan Menteri ATR/ BPN terkait lahan sawah dilindungi (LSD) yang menghambat investasi.

### Peluang

Peluang yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupeten Probolinggo serta dukungan Anggaran Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Inpres serta dana lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung program dan kegiatan yang telah disusun;
b. Pengembangan wilayah dibeberapa sektor dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat terutama dibidang infrastruktur menjadi program prioritas baik di daerah hingga pusat;
c. Terbukanya kerjasama dengan beberapa pihak dalam mendukung pembangunan daerah khususnya dalam terkait peningkatan kualitas infrastruktur.

## 2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum merumuskan suatu program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, diperlukan adanya identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis yang berkaitan dengan perangkat daerah. Dalam mengidentifikasi permasalhaan dan isu strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo mengacu pada Perda Kabupaten Probolinggo No 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029, Laporan KLHS RPJMD tahun 2025 – 2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### 2.6.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun – tahun sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan sehingga harus dilakukan evaluasi kembali agar ditahun yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum bisa diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal dan ancaman yang belum bisa diantisipasi dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Secara umum, permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2**
Peta Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Probolinggo

***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

Sedangkan apabila dilihat dari permasalahan – permasalahan pada tiap – tiap bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

### A. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga yang fokus pekerjaannya bertanggungjawab terkait penyelenggaraan jalan Kabupaten Probolinggo, berikut permasalahan yang ada pada Bidang Bina Marga:

1. Fenomena kendaraan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) menjadi penyebab utama kerusakan jalan;
2. Pertumbuhan volume kendaraan tidak sejalan dengan pertumbuhan kapasitas jalan;
3. Waktu tempuh yang cukup lama, karena masih ditemui jalan rusak didaerah perbatasan;
4. Partisipasi warga yang masih kurang dalam upaya menjaga kualitas jalan dan jembatan;

### B. Permasalahan Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air yang fokus pekerjaannya bertanggungjawab terkait pengelolaan bangunan sumber daya air kewenangan Kabupaten Probolinggo, berikut permasalahan yang ada pada Bidang Sumber Daya Air:

1. Tidak idealnya jumlah tenaga teknis dan latar belakang pendidikan petugas OP dalam pengoperasian dan pemeliharaan saluran irigasi;
2. Masih terdapat saluran irigasi yang mengalami kerusakan dan memiliki sedimentasi yang cukup tinggi;
3. Banyaknya pelanggaran pemanfaatan sempadan saluran irigasi;
4. Banyaknya aset tanah irigasi yang belum terinventarisir.

### C. Permasalahan Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan

Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan yang fokus pekerjaannya bertanggungjawab terkait pelaksanaan fasilitasi sertifikasi tenaga konstruksi dan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan serta pemanfaatan jasa konstruksi pada wilayah Kabupaten Probolinggo, berikut permasalahan yang ada pada Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan:

1. Kondisi alat berat yang sudah usang sehingga berdampak pada kurangnya daya saing dengan penyedia alat berat lain;

2. Biaya pemeliharaan alat berat yang cukup tinggi;
3. Sarana dan prasarana laboratorium uji konstruksi yang masih kurang memadai;
4. Kurangnya tenaga analis laboratorium uji konstruksi.

**D. Permasalahan Bidang Tata Ruang**

Bidang Tata Ruang yang fokus pekerjaannya bertanggungjawab terkait penyelenggaraan penataan ruang pada wilayah Kabupaten Probolinggo, berikut permasalahan yang ada pada Bidang Tata Ruang:

1. Belum tersusunnya Perkada RDTR dibeberapa wilayah perencanaan
2. Belum terlegalisasinya Revisi Perda RTRW Kabupaten Probolinggo
3. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tata ruang

**E. Permasalahan Bagian Kesekertariatan**

Bagian kesekretariatan yang fokus pekerjaannya bertanggungjawab terkait akuntabilitas tata kelola perangkat daerah, berikut permasalahan yang ada pada Bagian Kesekretariatan:

1. Pengelolaan barang aset bergerak dan tidak bergerak yang kurang optimal
2. Terdapat kelemahan dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kurangnya pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan aparatur.
3. Terjadi tumpang tindih tugas dan kurangnya koordinasi antar unit, sehingga mekanisme kerja belum tertata dalam sistem yang terpadu, efektif, dan efisien.
4. Kekurangan jumlah dan kapasitas aparatur yang belum sesuai dengan tuntutan tugas, serta fasilitas yang tidak memadai.

### 2.6.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Selain melihat permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo dalam membuat suatu program dan kegiatan, juga harus mengidentifikasi isu – isu strategis baik dalam lingkup global, nasional hingga regional yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo. Pengidentifikasian isu – isu tersebut dapat kita telaah dari RPJMN tahun 2025 – 2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 – 2029, RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 serta dokumen perencanaan lainnya yang terdapat di Kabupaten Probolinggo.

### 2.6.2.1. Isu Strategis Global/ Internasional

Dalam menentukan arah pembangunan di Negara Indonesia, serta dalam menentukan program – program yang akan menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, perlu adanya pengidentifikasian terhadap isu strategis global. Berikut isu strategis global yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029:

**1. Isu Perubahan Iklim dan SDGs**

Kerusakan lingkungan global memicu perubahan iklim yang mengancam kehidupan manusia. Dunia merespons melalui agenda SDGs 2030, termasuk Indonesia. Kabupaten Probolinggo perlu memasukkan komitmen penurunan emisi GRK dalam RPJMD 2024 – 2029. Selain itu, tuntutan ekonomi hijau, energi bersih, dan standar ESG mendorong daerah untuk beradaptasi cepat agar tidak tertinggal dalam arus investasi global. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo dalam hal ini menjadi OPD penunjang dalam program dan kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo baik dalam segi infrastruktur jalan, sumber daya air, pelayanan jasa konstruksi, maupun penataan ruang.

**2. Globalisasi Ekonomi dan Proteksionisme**

Konflik internasional, proteksionisme, dan ketidakpastian ekonomi global berdampak pada harga barang, nilai tukar, dan aliran investasi. Hal ini menjadi tantangan bagi daerah yang bergantung pada ekspor, namun sekaligus membuka peluang memperkuat ketahanan pangan, energi, dan industri ramah lingkungan. Dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berupaya dalam penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Probolinggo.

**3. Disrupsi Teknologi Informasi**

Kemajuan teknologi informasi mengubah perilaku masyarakat dan cara berusaha dalam peningkatan perekonomian. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan

produktivitas, efisiensi pelayanan publik, serta kualitas SDM agar siap menghadapi revolusi industry. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat juga menerapkan teknologi agar lebih efektif dan efisien melalui aplikasi dan web.

**4. Isu Geopolitik dan Geoekonomi**

Ketegangan global dan regional berdampak pada stabilitas dan investasi. Namun, meningkatnya permintaan energi bersih, mineral strategis, dan pangan memberi peluang besar bagi daerah. Pemerintah perlu memperkuat strategi hilirisasi, kerjasama regional, serta ketahanan energi dan pangan. Dalam hal ini, peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas menjadi poin penting dalam peningkatan investasi yang selaras dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### 2.6.2.2. Telaahan Isu Strategis RPJMN tahun 2025 – 2029

Penentuan arah pembangunan Nasional merupakan suatu poin penting yang harus dilakukan dengan menentukan sesuai dengan isu strategis yang terdapat di Negara Indonesia ini. Berikut isu strategis yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029:

**1. Rendahnya Produktivitas**

Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat.

**2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**3. Krisis Lingkungan**

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

**4. Geopolitik dan Geoekonomi**

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko

geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global.

Faktor gejolak geopolitik, telenan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya.

Dengan gambaran tersebut, tantangan – tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri rnaupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

**5. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah**

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi persyaratan dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Adapun pada indikator indeks perilaku anti korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019 – 2022, namun capaian tersebut sesikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya.

### 2.6.2.3. Telaahan Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 – 2029

Dalam mendukung arah pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2025 tentamg RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 – 2029 mengidentifikasi beberapa isu strategis guna penyelarasan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan yaitu:

1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah, meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui peningkatan konektivitas wilayah dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar.
2. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja, perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup, perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan, perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin, pengembangan program – program ekonomi dan kewirausahaan serta program – program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui program sertifikasi dibidang konstruksi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik, difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Probolinggo selalu melakukan perbaikan baik dalam perbaikan SDM dan pengadministrasian.

4. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Untuk menjaga kedaulatan pangan Jawa Timur dan mendukung swasembada pangan nasional ke depan, perlu dilakukan upaya regenerasi petani sebagai produsen komoditas pangan pertanian. Dukungan terhadap kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo merencanakan program dan kegiatan dalam penyediaan dan pengelolaan air irigasi untuk mendukung peningkatan hasil pertanian agar lebih maksimal.

#### 2.6.2.4. Telaahan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029

Dalam rangka menyelaraskan arah pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 5 tahun 2025 tentnag RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025 – 2030. Terdapat beberap isu strategis yang menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Probolinggo:

1. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin. Berbagai upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas dan terjangkau, penyediaan program perlindungan social yang adaptif, serta pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan keterampilan, akses modal, dan fasilitasi lapangan kerja. Upaya yang dapat dilakukan antara

lain dengan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan melakukan pemetaan potensi wilayah melalui penataan ruang.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompentensi sumber daya manusia diantaranya dengan perluasan dan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta peningkatan standar hidup layak dan berkualitas bagi semua masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing untuk menjawab tuntutan zaman, namun tetap memegang teguh nilai – nilai agama dan berkarakter. Upaya yang dilakukan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan fasilitas sertifikasi keterampilan dibidang konstruksi.
3. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang gesit (agile), kolaboratif, disertai dengan pelayanan publik yang adaptif sesuai dengan kebutuhan, peningkatan clean and good governance yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo menyediakan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana pendukung agar penyelesaian pekerjaan lebih efektif dan efisien.
4. Peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan belanja yang lebih efisien. Upaya ini meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan wajib pajak, menggali potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan, seperti sektor pariwisata, industri kreatif, pertanian, dan UMKM, yang dapat menjadi sumber penerimaan baru. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan juga penting untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, dan

kepatuhan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo dalam upaya mendukung peningkatan kemandirian fiskal dengan melakukan penyediaan alat berat dan dan penyediaan laboratorium uji konstruksi.

5. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi disparitas antar wilayah, pemeliharaan infrastruktur secara berkala, penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan aman bencana, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dan inovasi digital dalam pengelolaan sarana prasarana. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu pengampu dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

#### 2.6.2.5. Telaahan Isu Strategis pada Dokumen RTRW Kabupaten Probolinggo

Merujuk pada dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029, rancangan RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045 telah memberikan arahan tentang pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten sesuai dengan potensi dan kaedah yang berlaku. Fokus arahan RTRW yang menjadi perhatian dan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah pada penetapan lokasi Kawasan – Kawasan strategis maupun zonasi lainnya, khususnya pada indikasi program yang akan diimplementasikan pada periode tahun tersebut. Rencana Kawasan Strategis, Khususnya Strategis Kepentingan EKONOMI menjadi acuan untuk perencanaan yang THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) di masa mendatang untuk percepatan pembangunan ekonomi kabupaten. Sementara itu, Rencana zonasi lainnya menjadi acuan penyediaan infrastruktur/ sarana prasarana yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan merata di seluruh wilayah kabupaten. Pun demikian dengan arahan dokumen rencana pembangunan jangka panjang atau masterplan pembangunan sektoral yang saat ini tersedia. Tercatat terdapat dokumen Tataran Transportasi Lokal Kabupaten

Probolinggo Tahun 2017 – 2037, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 – 2052, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 – 2034, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 – 2036, Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2039, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2018 - 2038, Masterplan Persampahan Tahun 2017 – 2037 serta Masterplan Drainase Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 – 2037. Arahan rencana pengembangan dari berbagai dokumen ini, khususnya indikasi program yang dilaksanakan pada periode tahun 2025 – 2029 dapat menjadi acuan kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Probolinggo. Berikut isu strategis yang menjadi urusan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo

Kebijakan kewilyahan pada Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) antara lain:

a. Peningkatan fungsi jalan menjadi kolektor primer
b. Pelebaran jalan pada jalan nasional, pada jalan kolektor primer
c. Pengembangan kawasan tempat pelelangan ikan di pelabuhan Kalibuntu
d. Menghidupkan kembali jalur angkutan umum pada titik titik pusat transportasi
e. Pengembangan perlengkapan jalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku

Kebijakan kewilayahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) antara lain:

a. Perencanaan ruang dan pembangunan terintegrasi
b. Pengendalian alih guna lahan ruang hijau
c. Pengembangan fisik bangunan atau pendirian bangunan pendukung fungsi badan air untuk menjaga kualitas air
d. Peningkatan fungsi ruang hijau sebagai upaya perbaikan kualitas udara

e. Pengembangan sistem deteksi dini bencana dan pembangunan untuk kepentingan mitigasi bencana serta pengembangan jaringan evakuasi bencana
f. Penataan pengembangan permukiman dan lahan terbangun sebagai pengendali arus urbanisasi

Kebijakan kewilayahan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) antara lain :

a. Pembangunan aksesibilitas pariwisata
b. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata

Kebijakan kewilayahan Masterplan Drainase antara lain :

a. Pengendalian banjir akibat limpasan pada daerah hulu
b. Penggunaan alur saluran /sungai yang sudah ada
c. Mengkonversi saluran irigasi menjadi saluran drainase bila sudah tidak ada lahan sawah yang harus diairi, dengan persetujuan pihak terkait
d. Membuat/menormalisasi saluran tepi jalan sesuai debit yang dialirkan

### 2.6.2.6. Telaahan Isu Strategis pada Dokumen KLHS Kabupaten Probolinggo

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen wajib yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 memuat program dan kegiatan berbasis pembangunan berkelanjutan. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam dokumen KLHS Kabupaten Probolinggo memuat beberapa isu strategis yang menjadi pokok pikiran dalam upaya mencari penyelesaian permasalahan yang ada terutama terkait lingkungan. Isu strategis yang tercantum dalam dokumen KLHS

Kabupaten Probolinggo dan menjadi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terbagi atas berbagai isu sebagai berikut:

**A. Isu Lingkungan**

Isu Lingkungan yang tertuang pada dokumen KLHS Kabupaten Probolinggo dan menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Debit air berkurang dan terjadi abrasi;
2. Kekeringan pada lahan sawah;
3. terjadinya perubahan morfologi sungai akibat penambangan pasir dan tambang tanah.

**B. Isu Sosial**

Isu Sosial yang tertuang pada dokumen KLHS Kabupaten Probolinggo dan menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan utama;
2. Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata;
3. Peningkatan kinerja birokrasi;
4. Masih terdapat 10% pelanggaran K3 yang belum bisa terselesaikan

**C. Isu Ekonomi**

Isu Ekonomi yang tertuang pada dokumen KLHS Kabupaten Probolinggo dan menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan investor dalam negeri dan luar negeri;
2. Perlunya peningkatan pertumbuhan industri;
3. Perlu adanya peningkatan kompetensi tenaga kerja;
4. Rendahnya kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu faktor tingginya angka pengangguran, dengan demikian Pendidikan lifeskill perlu dimasifkan pada angkatan kerja yang belum bekerja.

**D. Isu Infrastruktur**

Isu Infrastruktur yang tertuang pada dokumen KLHS Kabupaten Probolinggo dan menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat – pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata;
2. Kurangnya infrastruktu bagi masyarakat untuk menuju tempat wisata;
3. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur seperti jalan dalam kondisi yang bagus;
4. Perlunya pengendalian pada luasan irigasi;
5. Permasalahan akan pendirian sanksi masih terkendala akan peraturan yang berlaku, masih belum ada sanksi yang tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran tata ruang.

### 2.6.2.7. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan isu – isu strategis yang tertuang dalam beberapa dokumen perencanaan dan melalui isu – isu global hingga regional di Kabupaten Probolinggo, maka dirumuskan beberapa isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam mendukung peningkatan nilai ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan, peningkatan efisiensi dalam pendistribusian, pengembangan potensi wilayah sebagai destinasi wisata;
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui realisasi investasi dan ekonomi hijau, dengan perencanaan penataan ruang dibeberapa sektor pada wilayah Kabupaten Probolinggo;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dibidang Penyedia Jasa Konstruksi dengan melalui sertifikasi pelatihan dibidang konstruksi dalam mendukung profesionalisme dalam bekerja dan mengurangi angka kemiskinan;
4. Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah dengan menerapkan teknologi informasi pada era digitalisasi.

Adapun Teknik dalam perumusan isu strategis diatas dengan melihat pada potensi yang dimiliki daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan yang dimiliki, isu KLHS yang relevan, dan isu – isu dari berbagai telaahan sehingga menjadi Isu yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo.

**Tabel 2.2.**
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Probolinggo

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan;<br>2. Potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, serta pariwisata berbasis alam. | 1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih kurang optimal | 1. Kurangnya infrastruktur bagi masyarakat untuk menuju tempat wisata<br>2. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur seperti jalan dalam kondisi yang bagus<br>3. Perlunya pengendalian pada luasan irigasi<br>4. Jaringan irigasi mengalami kerusakan antara 30% - 45%, baik pada saluran maupun pada bangunan irigasinya<br>5. Pada kawasan pesisir terdapat abrasi pantai | 1. Perubahan Demograsi Global<br>2. Globalisasi Ekonomi dan Proteksionisme<br>3. Geopolitik dan Geoekonomi | 1. Rendahnya Produktivitas<br>2. Krisis Lingkungan<br>3. Geopolitik dan Geoekonomi | 1. Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah<br>2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan | 1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar |
| 3. Potensi pendanaan dari Pihak Luar masyarakat maupun swasta (CSR) | 2. Belum rampungnya Perda RTRW dan Perkada RDTR di Kabupaten Probolinggo | | 4. Isu Perubahan Iklim dan SDGs | | 3. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja, perluasan akses layanan dasar | 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui realisasi investasi dan ekonomi hijau |
| 4. Potensi Sunber daya Manusia Jumlah Penduduk 1,2 Juta Jiwa | 3. Penyediaan layanan jasa konstruksi dan peralayan yang kurang optimal | | | 4. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia | 4. Pengembangan SDM | 3. Meningkatkan kualitas SDM, terutama dibidang Penyedia Jasa Konstruksi |
| | 4. Kualitas dan kualitas sumber daya manusia yang kurang akibat dari usia dan latar belakang pendidikan yang masih rendah di beberapa posisi | | 5. Disrupsi Teknologi Informasi | 5. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah | 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik | 4. Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah |

***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

# BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam merumuskan suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo perpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya yakni dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bagaimana standar teknisnya. NSPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo ini mencakup berbagai bentuk aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian kegiatan konstruksi, infrastruktur serta penataan ruang wilayah Kabupaten Probolinggo.

### 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mendukung Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan menjadi visi dan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 yaitu *"Kabupaten Probolinggo Sejahtera, Amanah religious, dan Eksis berdaya saing (SAE)"*. Visi ini dicapai dengan melalui 5 (lima) misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dituangkan dalam 5 (lima) SAE.

**Gambar 3.1.**
Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo

***Sumber:*** *RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029*

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 - 2029, terutama

dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah telah menterjemahkan visi dan misi tersebut menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah.

Melalui misi ke 4 (empat) yaitu **"SAE INFRASTRUKTUR"** dengan uraian *"Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Didaerah Basis Produksi, Daerah Terluar, Daerah Terpencil Serta Perwilayahan Industri Secara Merata".* Terdapat tujuan Pembangunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yaitu *"Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah"* yang dijabarkan melalui 3 (Tiga) sasaran strategis.

**Gambar 3.2.**
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 4 (empat)
Kabupaten Probolinggo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TUJUAN** | **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah** | | |
| **SASARAN 1** | **Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur** | **INDIKATOR** | **Indeks Infrastruktur Dasar** |
| **SASARAN 2** | **Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien** | **INDIKATOR** | **Indeks Konektivitas Wilayah** |
| **SASARAN 3** | **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** | **INDIKATOR** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** |

***Sumber:*** *RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029*

Dari 3 (tiga) Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 untuk misi 4 (empat), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo berperan dalam pencapaian indikator dari Sasaran 1 *"Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur"* dan Sasaran 2 *"Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien"*. Dari 2 (dua) sasaran pembangunan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merumuskan 1 (satu) tujuan pembangunan, yaitu *"Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum yang Prima dalam Mendukung Konektivitas dan Pengembangan Wilayah".* Dan terdapat 5 sasaran yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo dengan 4 (empat) sasaran utama dan 1 (satu) sasaran pendukung yang akan dicapai.

**Gambar 3.3.**
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Probolinggo

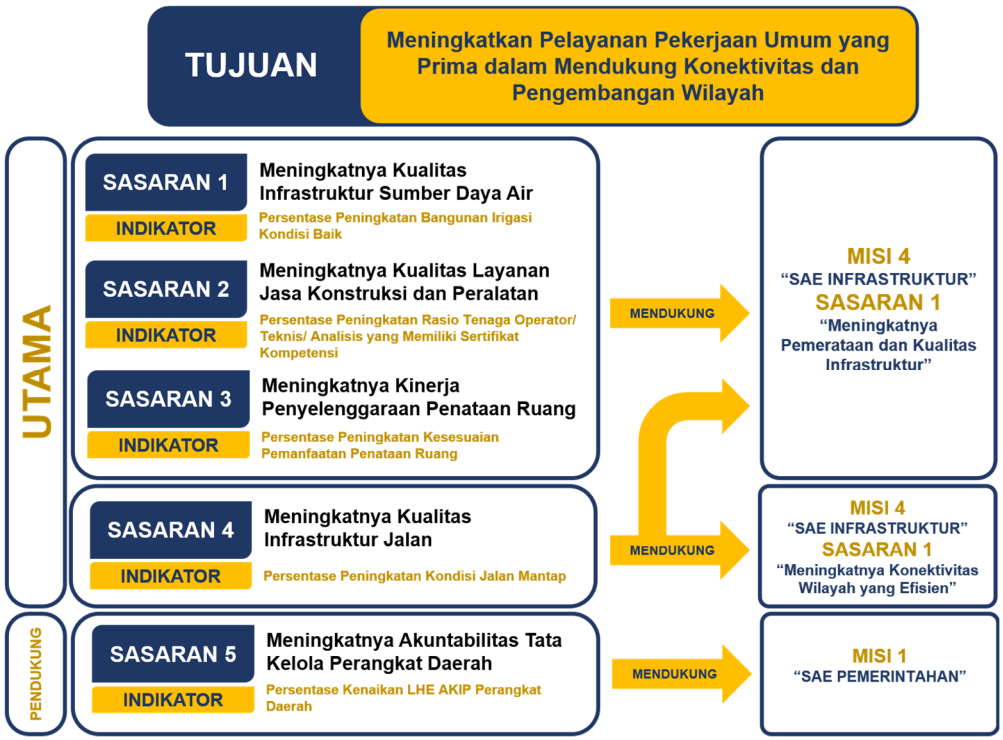


***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

Dari 5 (lima) sasaran diatas terdapat 4 (empat) sasaranyang merujuk pada pembangunan infrastruktur dalam mendukung misi pembangunan 4 (empat) yakni "SAE INFRASTRUKTUR" dan 1 sasaran merujuk pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung misi pembangunan 1 (satu) yakni "SAE PEMERINTAH". Dengan tujuan dan sasaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo menetapkan target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selama lima tahun kedepan, dimana capaian tahun 2024 sebagai *baseline*-nya, yang tercantum pada Tabel 3.1. berikut:

**Tabel 3.1.**
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Probolinggo

| NSPK DAN SASARAN RENSTRA YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN- | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur | Mewujudkan Pelayanan Pekerjaan Umum yang Prima dalam Mendukung Konektivitas dan Pengembangan Wilayah | | Indeks Infrastruktur Dasar | 70,28 | 70,97 | 71,60 | 72,23 | 72,91 | 73,61 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air | Persentase Peningkatan Bangunan Irigasi Kondisi Baik | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Konstruksi dan Peralatan | Persentase Peningkatan Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | 1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
| | | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan | Persentase Peningkatan Kondisi Jalan Mantap | 1,19 | 1,23 | 1,23 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | |
| Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien | | | Indeks Konektivitas Wilayah | 68,26 | 68,90 | 69,62 | 69,99 | 70,91 | 71,53 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan | Persentase Peningkatan Kondisi Jalan Mantap | 1,19 | 1,23 | 1,23 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

Dengan target dari tujuan dan sasaran yang tercantum pada Tabel 3.1. diatas, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo mampu untuk mencapai target dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

## 3.2. Definisi Operasional

Definisi Operasional (DO) dalam dokumen perencanaan merupakan penjabaran mengenai indikator yang menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja dilaksanakan. Dimana indikator tersebut harus dapat diukur atau dihitung sebagai bahan dalam proses evaluasi kinerja suatu perangkat daerah. Dari tujuan, sasaran dan program yang telah dirumuskan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo, berikut penjabaran mengenai Definisi Operasionalnya:

### A. TUJUAN

Indikator tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo merujuk pada sasaran dari pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029. Definisi Operasional dari indikator tujuan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada Gambar 3.4.

**Gambar 3.4.**
Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan Tujuan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo

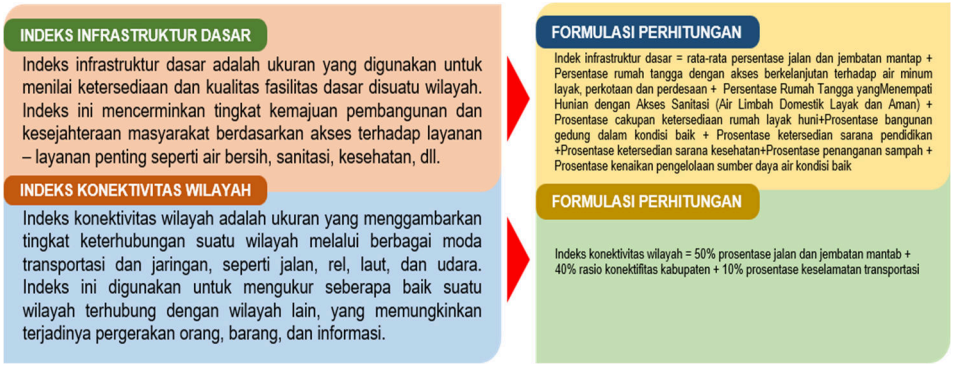


***Sumber:*** *RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 - 2029*

### B. SASARAN

Indikator sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan dihitung dengan melihat peningkatan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa besar peningkatan kinerja yang telah dilakukan pada tiap tahunnya dan menjadi bahan untuk

melakukan perbaikan ditahun berikutnya. Definisi Operasional dari indikator sasaran dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada Gambar 3.5.

**Gambar 3.5.**
Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo

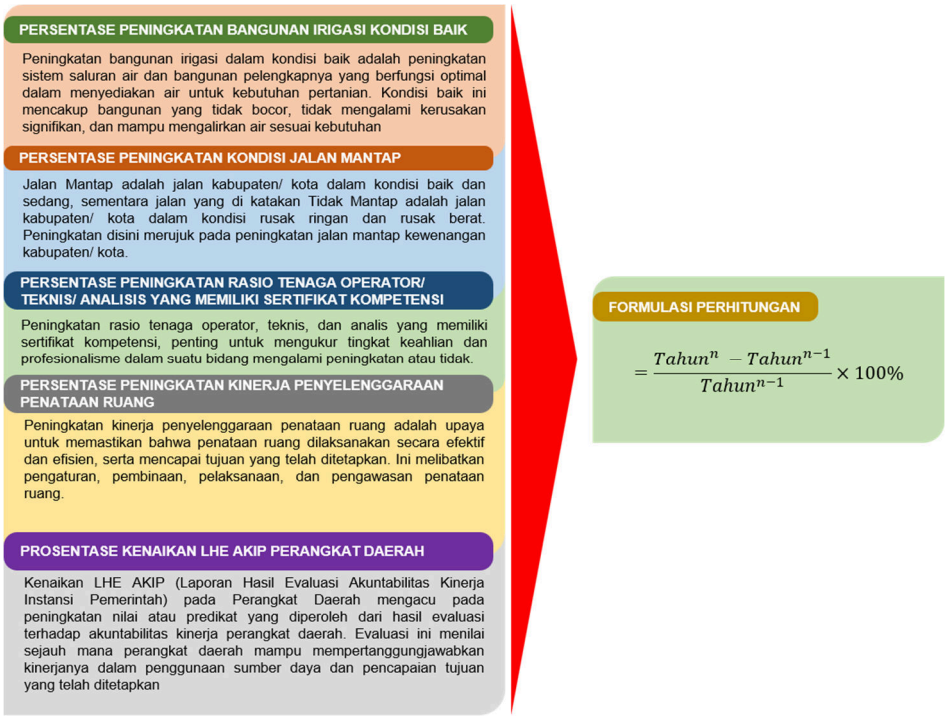


***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

## C. PROGRAM

Indikator program dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo melihat seberapa besar pencapaian kinerja yang telah dilakukan pada tahun berjalan sehingga dapat dengan jelas diketahui seberapa besar dampak yang telah dikerjakan pada proses pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo. Definisi Operasional dari indikator program dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada Gambar 3.6.

**Gambar 3.6.**
Definisi Operasional Program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo

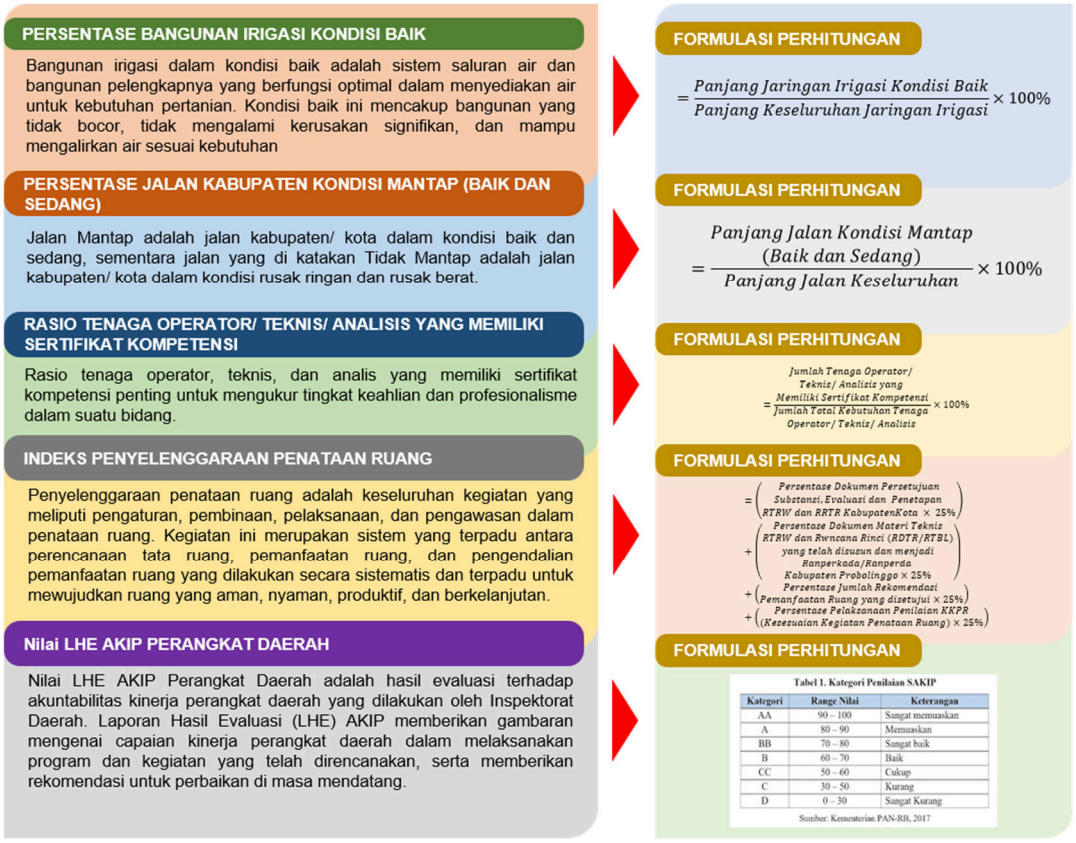


***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Probolinggo*

## 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Strategi dan arah Kebijakan merupakan suatu langkah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD tahun 2025 – 2029. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dijelaskan bahwa rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa

optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3.1. Strategi Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029.

Strategi pembangunan berperan sebagai panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan agar tepat sasaran. Diharapkan dengan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat mewujudkan kualitas infrastruktur dasar Kabupaten Probolinggo lebih baik lagi daripada sebelumnya serta dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

**Tabel 3.2.**
Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Probolinggo

| TAHAP I<br>2026 | TAHAP II<br>2027 | TAHAP III<br>2028 | TAHAP IV<br>2029 | TAHAP V<br>2030 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Tahap Penataan Awal dan Fondasi Pembangunan,**<br><br>Difokuskan pada sinkronisasi program dengan RPJMD, pemetaan kebutuhan infrastruktur prioritas (irigasi, jalan kabupaten, jasa konstruksi, dan penataan ruang), serta penyiapan regulasi dan kelembagaan. Kegiatan diarahkan pada baseline data, perencanaan detail teknis, dan persiapan pelaksanaan agar pembangunan lima tahun berjalan terarah dan terukur. | **Penguatan Pondasi Pembangunan Infrastruktur Dasar,**<br><br>Melalui pengelolaan bangunan irigasi, penyelenggaraan jalan kabupaten, dan peningkatan awal sertifikasi tenaga teknis konstruksi serta penyelenggaraan kegiatan penataan ruang. Tahun ini menjadi fondasi tercapainya layanan infrastruktur yang lebih baik dan terukur. | **Percepatan Penguatan Pondasi Infrastruktur,**<br><br>Dengan fokus pada peningkatan kapasitas jaringan irigasi, pembangunan serta pemeliharaan jalan kabupaten dalam kondisi mantap, dan peningkatan jumlah tenaga konstruksi bersertifikat serta peningkatan penyelenggaraan kegiatan penataan ruang. Arah pembangunan ditujukan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih merata. | **Pemantapan Kualitas Infrastruktur Strategis,**<br><br>Dengan menekankan pemeliharaan berkelanjutan jaringan irigasi dan jalan kabupaten, serta percepatan sertifikasi tenaga teknis konstruksi penyelenggaraan kegiatan penataan ruang. Tahap ini diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik yang responsif, bersih, dan akuntabel. | **Tahap Pencapaian Outcome Pembangunan Dan Keberlanjutan,**<br><br>Ditandai dengan kondisi infrastruktur yang semakin baik (irigasi, jalan mantap, dan tenaga teknis bersertifikat, serta penyelenggaraan penataan ruang meningkat signifikan). Pembangunan diarahkan pada keberlanjutan layanan infrastruktur yang mendukung transformasi social – ekonomi Kabupaten Probolinggo. |

***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

Strategi dalam pentahapan yang tercantum pada Tabel 3.2. diatas kiranya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan strategi yang telah tersusun, agar rencana pembangunan kedepan terlaksana sesuai dengan harapan.

### 3.3.2. Lokus Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Lokus renstra adalah lokasi suatu wilayah atau tempat kegiatan yang akan dilakukan pembangunan sesuai dengan program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Tujuan dari adanya lokus ini agar pelaksanaan program dan kegiatan yang tersusun dapat terarah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah yang terdapat pada rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Lokus renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo akan dilaksanakan pada seluruh wilayah kabupaten probolinggo khususunya yang memiliki potensi wisata dalam mendukung peningkatan perekonomian, potensi agropolitan dalam mendukung ketahanan pangan daerah, serta daerah perbatasan dalam mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Probolinggo.

### 3.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029.

Arah kebijakan pembangunan berperan sebagai salah satu bentuk upaya dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Perumusan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo mengacu pada Tujuan dan Arah Kebijakan yang tercantum pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 sehingga tercipta keselarasan dalam perumusan arah kebijakan pada level Perangkat Daerah. Berikut arah kebijakan yang telah dirumuskan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029.

**Tabel 3.3.**
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah | 1. Pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan serta perlengkapannya untuk mendukung konektivitas wilayah berbasis tata ruang<br>2. Perbaikan dan penambahan jaringan irigasi dalam rangka peningkatan ketahanan pangan | 1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan<br>2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air<br>3. Peningkatan Kualitas Layanan Jasa Konstruksi dan Peralatan<br>4. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang | 1. Meningkatnya Jalan Mantap (kondisi baik dan sedang)<br>2. Meningkatnya bangunan irigasi dalam kondisi baik<br>3. Meningkatnya rasio tenaga operator, teknis, dan analis yang memiliki sertifikat kompetensi<br>4. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang |
| 2. | 1. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional | 1. Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara terbuka bersama masyarakat. | 1. Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | 1. Meningkatny Prosentase Kenaikan LHE AKIP |

***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

Dari Tabel 3.3. diatas, terdapat 5 arah kebijakan yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo dalam mendukung arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan

   Dalam upaya mendukung peningkatan layanan infrastruktur dasar pemerintah daerah dan konektivitas antar wilayah Kabupaten Probolinggo, peningakatan kualitas infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor pendukungnya. Melalui pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan baik secara berkala maupun rutin jalan dan jembatan diharap dapat bersinergi dengan tujuan yang telah disusun pemerintah daerah hingga pusat dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air

   Dalam upaya mendukung peningkatan layanan infrastruktur dasar pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air terutama pada saluran irigasi menjadi poin penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo. Melalui pembangunan, peningkatan, serta operasi dan pemeliharaan secara rutin jaringan irigasi dan bangunan sumber daya air lainnya diharap dapat bersinergi dengan tujuan yang telah disusun pemerintah daerah hingga pusat dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan dan ekonomi hijau.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Jasa Konstruksi dan Peralatan

   Dalam upaya mendukung peningkatan layanan infrastruktur dasar pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, peningkatan kualitas layanan jasa konstruksi dan peralatan menjadi salah satu penunjang dalam pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo. Melalui fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pengawasan terhadap penyedia jasa konstruksi agar kualitas sumber daya manusia dan proyek pembangunan di Kabupaten Probolinggo meningkat.

4. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

   Dalam upaya mendukung peningkatan layanan infrastruktur dasar pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang menjadi salah satu penunjang dalam pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo. Melalui dokumen perencanaan pembangunan wilayah seperti RTRW dan RDTR kabupaten probolinggo, serta pengawasan terhadap pemanfaatan penataan ruang pada beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo dalam mendukung realisasi investasi, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat meningkat.

5. Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah

   Peningkatan akuntabilitas tata kelola perangkat daerah ini merujuk pada pentingnya transparansi data pengelolaan keuangan dan manajemen sumberdaya yang dimiliki perangkat daerah. Sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PROBOLINGGO

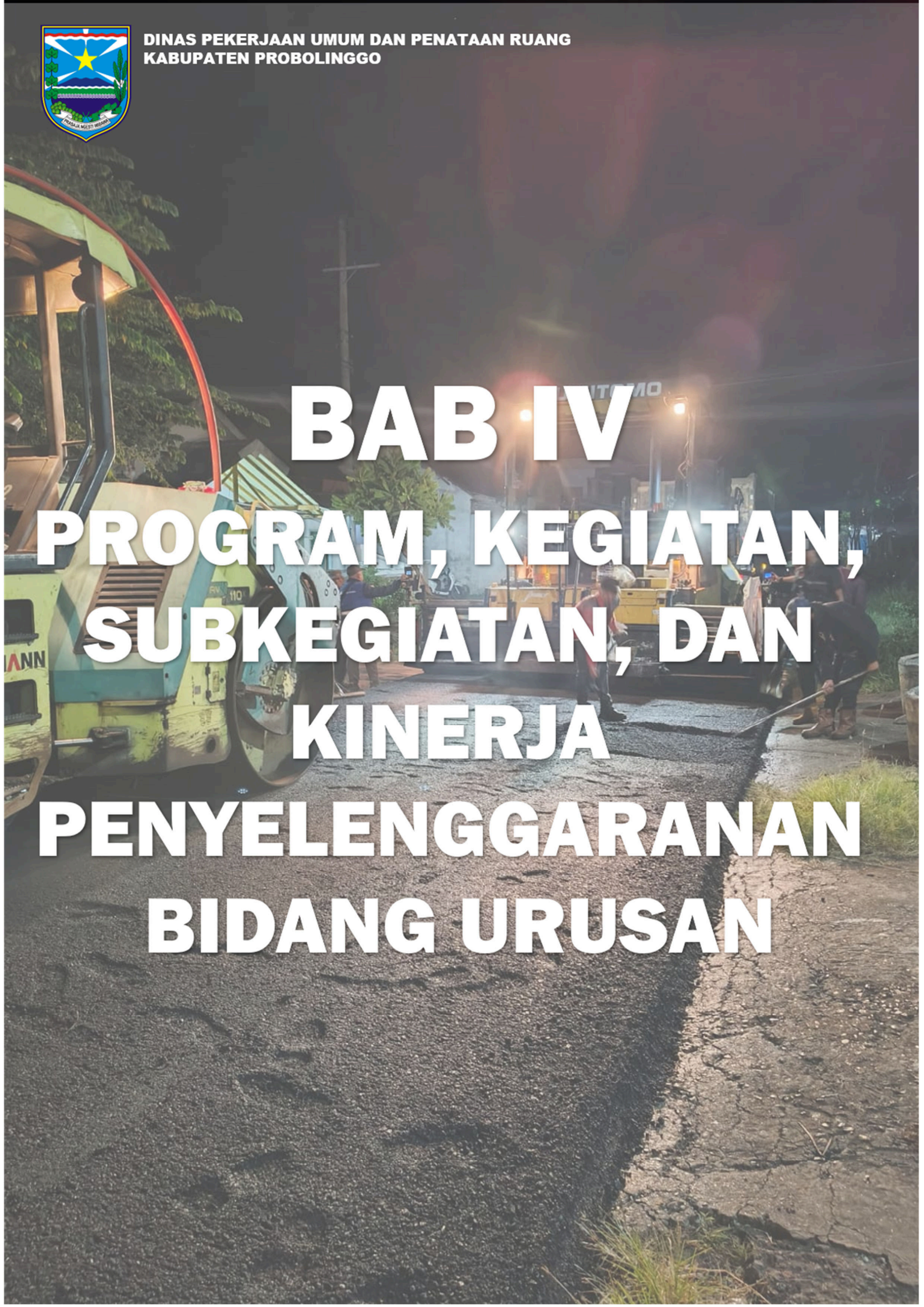

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARANAN BIDANG URUSAN

# BAB IV

## PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARANAN BIDANG URUSAN

Program yang disusun dalam dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 – 2029 ini, berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 serta dengan mempertimbangkan isu – isu strategis global, nasional, hingga regional. Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam menyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 – 2029 ini melalui pendekatan teknokratik (rasional komprehensif) dengan fokus pada memecahkan masalah menggunakan akal pikiran dan pendekatan pikiran, pendekatan bottom-up dimana perencanaan dimulai dari tingkat bawah.

Selain itu juga, dalam merencanakan sebuah program, tentu perlu adanya pengukuran kinerja dalam penyelenggaraan, agar dapat terarah dan fokus pada tujuan yang telah ditentukan.

### 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 – 2029 mengacu pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilakukan pada peiode sebulmnya dan penambahan beberapa subkegiatan baru dalam mendukung rencana pembangunan dan program prioritas yang telah disusun pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dalam dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029. Adapun teknik dalam merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 – 2029 seperti yang tertuang pada Tabel 4.1. Sedangkan untuk Rancangan Program, Kegiatan, Subkegiatans disertai target dan pendanaannya tertuang dalam Tabel 4.2

**Tabel 4.1.**
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 - 2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional** | | **Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah** | | | **Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah** | | |
| | | | **Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah** | | **Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | |
| | | | | **Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja.** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | |
| | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | **Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Keuangan Tersusun** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | **Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | |
| | | | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | **Terkelolanya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Keuangan Tersusun** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| | | | | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | |
| | | | | **Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Keuangan Tersusun** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | |
| | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | **Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlakasana** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | | Pengadaan Alat Besar | |
| | | | | | | Pengadaan Mebel | |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | **Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | |
| | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah** | **Meningkatnkan Pelayanan Pekerjaan Umum yang Prima dalam Mendukung Konektivitas dan Pengembangan Wilayah** | | | | **Indeks Infrastruktur Dasar** | | |
| | | **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air** | | | **Persentase Peningkatan Bangunan Irigasi Kondisi Baik** | | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air** | | **Persentase Bangunan Irigasi Kondisi Baik** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | |
| | | | | **Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Prosentase Bangunan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten yang Dikelola** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | | | | | | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | |
| | | | | | | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten / Kota | |
| | | | | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | |
| | | | | | | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | |
| | | | | **Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | | | | | | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | |
| | | | | | | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | |
| | | | | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | |
| | | | | | | Rehabilitasi Bendung Irigasi | |
| | | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan | | | Persentase Peningkatan Kondisi Jalan Mantap | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan | | Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | |
| | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota | Persentase Jalan Kabupaten yang Dikelola (Dibangun, Dipelihara, dan Ditingkatkan Kualitasnya) | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Pengelolaan Leger Jalan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | |
| | | | | | | Pembangunan Jalan | |
| | | | | | | Rehabilitasi Jalan | |
| | | | | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | |
| | | | | | | Penggantian Jembatan | |
| | | | | | | Rehabilitasi Jembatan | |
| | | | | | | Rekonstruksi Jalan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Pemeliharaan Berkala Jembatan | |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | |
| | | | | | | Pembangunan Jembatan | |
| | | Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Konstruksi dan Peralatan | | | Persentase Peningkatan Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Konstruksi dan Peralatan | | Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | |
| | | | | Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | |
| | | | | | | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | |
| | | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Meningkatnya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Diawasi/ Dimonev | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | |
| | | | | | | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | |
| | | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | Persentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang | | |
| | | | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang | | Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | |
| | | | | Meningkatnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Persentse Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Penetapan RDTR Kabupaten/ Kota | |
| | | | | | | Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota | |
| | | | | **Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Dokumen Materi Teknis RTRW dan Rencana Rinci (RDTR/RTBL) yang telah disusun dan menjadi Ranperkada/ Ranperda Kabupaten Probolinggo** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | | | | | | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | |
| | | | | **Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota** | **Persentase Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang Disetujui** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | |
| | | | | **Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pelaksanaan Penilaian KKPR (Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang)** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | |
| | | | | | **Indeks Konektivitas Wilayah** | | |
| | | **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan** | | | **Persentase Peningkatan Kondisi Jalan Mantap** | | |
| | | | **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan** | | **Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | |
| | | | | **Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota** | **Persentase Jalan Kabupaten yang Dikelola (Dibangun, Dipelihara, dan Ditingkatkan Kualitasnya)** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | |
| | | | | | | Pengelolaan Leger Jalan | |
| | | | | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | |
| | | | | | | Pembangunan Jalan | |
| | | | | | | Rehabilitasi Jalan | |
| | | | | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | |
| | | | | | | Penggantian Jembatan | |
| | | | | | | Rehabilitasi Jembatan | |
| | | | | | | Rekonstruksi Jalan | |
| | | | | | | Pemeliharaan Berkala Jembatan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | |
| | | | | | | Pembangunan Jembatan | |

***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

**Tabel 4.2.**
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 147.632.408.004,44 | | 150.111.512.493,47 | | 179.932.106.237,03 | | 231.168.586.738,67 | | 249.634.626.709,06 | |
| 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 21.158.913.934 | | 21.394.000.000 | | 21.712.800.000 | | 22.155.800.000 | | 22.675.300.000 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 79,1 | 79,20 | 21.158.913.934 | 79,25 | 21.394.000.000 | 79,30 | 21.712.800.000 | 79,35 | 22.155.800.000 | 79,40 | 22.675.300.000 | |
| 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun | | | 15.414.000 | | 16.164.000 | | 16.014.000 | | 16.764.000 | | 17.514.000 | |
| 1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2.780.000 | | 2.930.000 | | 2.180.000 | | 2.330.000 | | 2.480.000 | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 9 | 5 | 2.780.000 | 5 | 2.930.000 | 5 | 2.180.000 | 5 | 2.330.000 | 5 | 2.480.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 2.460.000 | | 2.610.000 | | 2.760.000 | | 2.910.000 | | 3.060.000 | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 2.460.000 | 1 | 2.610.000 | 1 | 2.760.000 | 1 | 2.910.000 | 1 | 3.060.000 | |
| 1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 5.020.000 | | 5.170.000 | | 5.320.000 | | 5.470.000 | | 5.620.000 | |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 3 | 2 | 5.020.000 | 2 | 5.170.000 | 2 | 5.320.000 | 2 | 5.470.000 | 2 | 5.620.000 | |
| 1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 2.327.000 | | 2.477.000 | | 2.627.000 | | 2.777.000 | | 2.927.000 | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | 4 | 2.327.000 | 4 | 2.477.000 | 4 | 2.627.000 | 4 | 2.777.000 | 4 | 2.927.000 | |
| 1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2.827.000 | | 2.977.000 | | 3.127.000 | | 3.277.000 | | 3.427.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 5 | 2.827.000 | 5 | 2.977.000 | 5 | 3.127.000 | 5 | 3.277.000 | 5 | 3.427.000 | |
| 1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Tersusun | | | 10.576.775.934 | | 10.400.662.275 | | 10.778.191.934 | | 10.979.091.934 | | 11.179.991.934 | |
| 1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 10.564.191.934 | | 10.387.502.275 | | 10.764.191.934 | | 10.964.191.934 | | 11.164.191.934 | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 84 | 78 | 10.564.191.934 | 78 | 10.387.502.275 | 78 | 10.764.191.934 | 78 | 10.964.191.934 | 78 | 11.164.191.934 | |
| 1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 2.784.000 | | 2.910.000 | | 3.000.000 | | 3.150.000 | | 3.300.000 | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 2.784.000 | 12 | 2.910.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.150.000 | 12 | 3.300.000 | |
| 1.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 1.320.000 | | 1.450.000 | | 1.600.000 | | 1.750.000 | | 1.900.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 4 | 4 | 1.320.000 | 4 | 1.450.000 | 4 | 1.600.000 | 4 | 1.750.000 | 4 | 1.900.000 | |
| 1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 2.280.000 | | 2.350.000 | | 2.500.000 | | 2.650.000 | | 2.800.000 | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 2.280.000 | 1 | 2.350.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.650.000 | 1 | 2.800.000 | |
| 1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | 1.320.000 | | 1.450.000 | | 1.600.000 | | 1.750.000 | | 1.900.000 | |
| Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 3 | 4 | 1.320.000 | 4 | 1.450.000 | 4 | 1.600.000 | 4 | 1.750.000 | 4 | 1.900.000 | |
| 1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 1.320.000 | | 1.450.000 | | 1.600.000 | | 1.750.000 | | 1.900.000 | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 1.320.000 | 12 | 1.450.000 | 12 | 1.600.000 | 12 | 1.750.000 | 12 | 1.900.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 3.560.000 | | 3.550.000 | | 3.700.000 | | 3.850.000 | | 4.000.000 | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 2 | 3.560.000 | 2 | 3.550.000 | 2 | 3.700.000 | 2 | 3.850.000 | 2 | 4.000.000 | |
| 1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir | | | 1.320.000 | | 1.470.000 | | 1.620.000 | | 1.770.000 | | 1.920.000 | |
| 1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1.320.000 | | 1.470.000 | | 1.620.000 | | 1.770.000 | | 1.920.000 | |
| Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | 4 | 1.320.000 | 4 | 1.470.000 | 4 | 1.620.000 | 4 | 1.770.000 | 4 | 1.920.000 | |
| 1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Presentase Pendapatan Daerah yang Dikelola | | | 0 | | 2.100.000 | | 2.250.000 | | 2.400.000 | | 2.550.000 | |
| 1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 0 | | 2.100.000 | | 2.250.000 | | 2.400.000 | | 2.550.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.250.000 | 1 | 2.400.000 | 1 | 2.550.000 | |
| 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Terfasilitasi Layanan Kepegawaian | | | 332.300.000 | | 311.526.625 | | 330.602.956 | | 350.133.104 | | 360.133.104 | |
| 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 212.300.000 | | 181.526.625 | | 190.602.956 | | 200.133.104 | | 200.133.104 | |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | 1 | 212.300.000 | 1 | 181.526.625 | 1 | 190.602.956 | 1 | 200.133.104 | 1 | 200.133.104 | |
| 1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 120.000.000 | | 130.000.000 | | 140.000.000 | | 150.000.000 | | 160.000.000 | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | 25 | 120.000.000 | 25 | 130.000.000 | 25 | 140.000.000 | 25 | 150.000.000 | 25 | 160.000.000 | |
| 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlakasana | | | 953.260.000 | | 1.080.101.500 | | 1.201.321.600 | | 1.274.531.560 | | 1.351.520.734 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | 16.500.000 | | 18.000.000 | | 19.500.000 | | 21.000.000 | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | 15.000.000 | 2 | 16.500.000 | 2 | 18.000.000 | 2 | 19.500.000 | 2 | 21.000.000 | |
| 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 125.000.000 | | 167.015.500 | | 200.577.000 | | 183.012.500 | | 183.012.500 | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 125.000.000 | 12 | 167.015.500 | 12 | 200.577.000 | 12 | 183.012.500 | 12 | 183.012.500 | |
| 1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 24.200.000 | | 26.620.000 | | 28.000.000 | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | 20.000.000 | 2 | 22.000.000 | 2 | 24.200.000 | 2 | 26.620.000 | 2 | 28.000.000 | |
| 1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 251.260.000 | | 276.386.000 | | 304.024.600 | | 334.427.060 | | 351.991.505 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 251.260.000 | 12 | 276.386.000 | 12 | 304.024.600 | 12 | 334.427.060 | 12 | 351.991.505 | |
| 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 50.000.000 | 4 | 55.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 70.000.000 | |
| 1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 12.000.000 | | 13.200.000 | | 14.520.000 | | 15.972.000 | | 17.516.729 | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 12.000.000 | 12 | 13.200.000 | 12 | 14.520.000 | 12 | 15.972.000 | 12 | 17.516.729 | |
| 1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 480.000.000 | | 530.000.000 | | 580.000.000 | | 630.000.000 | | 680.000.000 | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 480.000.000 | 12 | 530.000.000 | 12 | 580.000.000 | 12 | 630.000.000 | 12 | 680.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah | | | 4.897.244.000 | | 5.570.175.600 | | 5.027.799.510 | | 5.246.639.402 | | 5.459.370.228 | |
| 1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 0 | | 350.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 1 | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 638.516.000 | | 297.415.000 | | 976.156.000 | | 731.040.000 | | 731.040.000 | |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | 2 | 638.516.000 | 4 | 297.415.000 | 11 | 976.156.000 | 6 | 731.040.000 | 6 | 731.040.000 | |
| 1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar | | | | 2.457.567.000 | | 4.000.000.000 | | 2.900.000.000 | | 3.500.000.000 | | 3.500.000.000 | |
| Tersedianya Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) | 1 | 3 | 2.457.567.000 | 1 | 4.000.000.000 | 3 | 2.900.000.000 | 3 | 3.500.000.000 | 2 | 3.500.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 446.369.000 | | 235.177.600 | | 412.444.000 | | 271.389.000 | | 412.444.000 | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 57 | 89 | 446.369.000 | 60 | 235.177.600 | 92 | 412.444.000 | 43 | 271.389.000 | 50 | 412.444.000 | |
| 1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.128.332.000 | | 490.283.000 | | 691.899.510 | | 696.910.402 | | 768.586.228 | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 65 | 1.128.332.000 | 51 | 490.283.000 | 51 | 691.899.510 | 65 | 696.910.402 | 65 | 768.586.228 | |
| 1.03.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 165.000.000 | | 150.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 0 | 3 | 165.000.000 | 2 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 61.460.000 | | 47.300.000 | | 47.300.000 | | 47.300.000 | | 47.300.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 6 | 61.460.000 | 5 | 47.300.000 | 5 | 47.300.000 | 5 | 47.300.000 | 5 | 47.300.000 | |
| 1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.033.300.000 | | 3.034.300.000 | | 3.035.300.000 | | 3.036.300.000 | | 3.037.300.000 | |
| 1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 20.000.000 | | 21.000.000 | | 22.000.000 | | 23.000.000 | | 24.000.000 | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 12 | 20.000.000 | 12 | 21.000.000 | 12 | 22.000.000 | 12 | 23.000.000 | 12 | 24.000.000 | |
| 1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 363.000.000 | | 363.000.000 | | 363.000.000 | | 363.000.000 | | 363.000.000 | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 363.000.000 | 12 | 363.000.000 | 12 | 363.000.000 | 12 | 363.000.000 | 12 | 363.000.000 | |
| 1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.650.300.000 | | 2.650.300.000 | | 2.650.300.000 | | 2.650.300.000 | | 2.650.300.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 2.650.300.000 | 12 | 2.650.300.000 | 12 | 2.650.300.000 | 12 | 2.650.300.000 | 12 | 2.650.300.000 | |
| 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | 1.349.300.000 | | 977.500.000 | | 1.319.700.000 | | 1.248.170.000 | | 1.265.000.000 | |
| 1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 350.000.000 | | 250.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 92 | 92 | 350.000.000 | 92 | 250.000.000 | 92 | 350.000.000 | 92 | 350.000.000 | 92 | 350.000.000 | |
| 1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 150.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 85.000.000 | | 90.000.000 | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 92 | 92 | 150.000.000 | 92 | 75.000.000 | 92 | 80.000.000 | 92 | 85.000.000 | 92 | 90.000.000 | |
| 1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br><br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | 200.000.000 | | 210.000.000 | | 220.000.000 | | 230.000.000 | | 240.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | 29 | 29 | 200.000.000 | 29 | 210.000.000 | 29 | 220.000.000 | 29 | 230.000.000 | 29 | 240.000.000 | |
| 1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 80.000.000 | | 52.500.000 | | 179.700.000 | | 93.170.000 | | 95.000.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | 50 | 80.000.000 | 50 | 52.500.000 | 50 | 179.700.000 | 50 | 93.170.000 | 50 | 95.000.000 | |
| 1.03.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 0 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | |
| 1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 350.000.000 | | 250.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2 | 350.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 350.000.000 | 2 | 350.000.000 | 2 | 350.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1.03.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 139.300.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | 30 | 139.300.000 | 30 | 60.000.000 | 30 | 60.000.000 | 30 | 60.000.000 | 30 | 60.000.000 | |
| 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | 13.564.456.080,44 | | 13.439.375.536 | | 13.286.825.669 | | 13.369.592.041 | | 13.559.649.291,68 | |
| Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air | Persentase Bangunan Irigasi Kondisi Baik (%) | 48,99 | 49,39 | 13.564.456.080,44 | 49,69 | 13.439.375.536 | 49,99 | 13.286.825.669 | 50,29 | 13.369.592.041 | 50,59 | 13.559.649.291,68 | |
| 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Bangunan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten yang Dikelola | | | 4.573.335.621,44 | | 4.448.255.077 | | 4.295.705.210 | | 4.378.471.582 | | 4.568.528.832,68 | |
| 1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | | | | 2.338.335.621,44 | | 2.213.255.077 | | 2.060.705.210 | | 2.143.471.582 | | 2.333.528.832,68 | |
| Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit) | 11 | 9 | 2.338.335.621,44 | 9 | 2.213.255.077 | 9 | 2.060.705.210 | 9 | 2.143.471.582 | 9 | 2.333.528.832,68 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1.03.02.2.01.0072 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | |
| Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | |
| 1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 475.000.000 | | 475.000.000 | | 475.000.000 | | 475.000.000 | | 475.000.000 | |
| Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga) | 0 | 1 | 475.000.000 | 1 | 475.000.000 | 1 | 475.000.000 | 1 | 475.000.000 | 1 | 475.000.000 | |
| 1.03.02.2.01.0088 - Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | |
| Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun (Unit) | 1 | 3 | 450.000.000 | 3 | 450.000.000 | 3 | 450.000.000 | 3 | 450.000.000 | 3 | 450.000.000 | |
| 1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | | | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM) | 0 | 4 | 750.000.000 | 4 | 750.000.000 | 4 | 750.000.000 | 4 | 750.000.000 | 4 | 750.000.000 | |
| 1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen) | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | |
| 1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | | | | 420.000.000 | | 420.000.000 | | 420.000.000 | | 420.000.000 | | 420.000.000 | |
| Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen) | 0 | 4 | 420.000.000 | 4 | 420.000.000 | 4 | 420.000.000 | 4 | 420.000.000 | 4 | 420.000.000 | |
| 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi | | | 8.991.120.459 | | 8.991.120.459 | | 8.991.120.459 | | 8.991.120.459 | | 8.991.120.459 | |
| 1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM) | 5,8 | 0,2 | 350.000.000 | 0,2 | 350.000.000 | 0,2 | 350.000.000 | 0,2 | 350.000.000 | 0,2 | 350.000.000 | |
| 1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 5.815.000.000 | | 5.815.000.000 | | 5.815.000.000 | | 5.815.000.000 | | 5.815.000.000 | |
| Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM) | 5,8 | 3,5 | 5.815.000.000 | 3,5 | 5.815.000.000 | 3,5 | 5.815.000.000 | 3,5 | 5.815.000.000 | 3,5 | 5.815.000.000 | |
| 1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 1.262.307.846 | | 1.262.307.846 | | 1.262.307.846 | | 1.262.307.846 | | 1.262.307.846 | |
| Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) | 350 | 350 | 1.262.307.846 | 350 | 1.262.307.846 | 350 | 1.262.307.846 | 350 | 1.262.307.846 | 350 | 1.262.307.846 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1.03.02.2.02.0030 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 173.812.613 | | 173.812.613 | | 173.812.613 | | 173.812.613 | | 173.812.613 | |
| Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga) | 1 | 1 | 173.812.613 | 1 | 173.812.613 | 1 | 173.812.613 | 1 | 173.812.613 | 1 | 173.812.613 | |
| 1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | | | | 420.000.000 | | 420.000.000 | | 420.000.000 | | 420.000.000 | | 420.000.000 | |
| Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) | 4 | 4 | 420.000.000 | 4 | 420.000.000 | 4 | 420.000.000 | 4 | 420.000.000 | 4 | 420.000.000 | |
| 1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | | 970.000.000 | | 970.000.000 | | 970.000.000 | | 970.000.000 | | 970.000.000 | |
| Terehabilitasinya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT) | 0 | 2 | 970.000.000 | 2 | 970.000.000 | 2 | 970.000.000 | 2 | 970.000.000 | 2 | 970.000.000 | |
| 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | 111.456.436.659 | | 113.809.336.957,47 | | 143.441.680.568,03 | | 194.121.894.697,67 | | 211.842.577.417,38 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan | Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) (%) | 73,08 | 75,5 | 111.456.436.659 | 76,73 | 113.809.336.957,47 | 78,23 | 143.441.680.568,03 | 80,13 | 194.121.894.697,67 | 82,23 | 211.842.577.417,38 | |
| 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Jalan Kabupaten yang Dikelola (Dipelihara, Ditingkatkan Kualitasnya) | | | 111.456.436.659 | | 113.809.336.957,47 | | 143.441.680.568,03 | | 194.121.894.697,67 | | 211.842.577.417,38 | |
| 1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan | | | | 200.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Terkelolanya Leger Jalan | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen) | 0 | 2 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | 1.200.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) | 905,813 | 910,31 | 1.200.000.000 | 905,813 | 300.000.000 | 905,813 | 300.000.000 | 905,813 | 300.000.000 | 905,813 | 300.000.000 | |
| 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 5.130.484.000 | | 5.471.570.000 | | 5.776.570.000 | | 6.186.120.000 | | 6.186.120.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) | 323,761 | 323,761 | 5.130.484.000 | 323,761 | 5.471.570.000 | 323,761 | 5.776.570.000 | 323,761 | 6.186.120.000 | 323,761 | 6.186.120.000 | |
| 1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan | | | | 1.400.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| Terlaksananya Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) | 0 | 0,35 | 1.400.000.000 | 0,25 | 500.000.000 | 0,25 | 500.000.000 | 0,25 | 500.000.000 | 0,25 | 500.000.000 | |
| 1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan | | | | 9.036.356.400 | | 9.777.740.050 | | 7.093.127.550 | | 20.789.287.236 | | 2.000.000.000 | |
| Terlaksananya Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM) | 0 | 3,9 | 9.036.356.400 | 4,35 | 9.777.740.050 | 2,05 | 7.093.127.550 | 7,67 | 20.789.287.236 | 2 | 2.000.000.000 | |
| 1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | 8.335.000.000 | | 4.398.776.000 | | 10.573.070.790 | | 21.918.326.400 | | 20.340.000.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) | 2 | 3,4 | 8.335.000.000 | 2,72 | 4.398.776.000 | 3,65 | 10.573.070.790 | 6,36 | 21.918.326.400 | 4,52 | 20.340.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan | | | | 13.609.842.645 | | 14.257.930.390 | | 16.475.650.191 | | 34.383.965.616 | | 19.221.591.889,5 | |
| Terlaksananya Penggantian Jembatan | Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter) | 0 | 38 | 13.609.842.645 | 38 | 14.257.930.390 | 42 | 16.475.650.191 | 84 | 34.383.965.616 | 49 | 19.221.591.889,5 | |
| 1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan | | | | 1.215.000.000 | | 255.000.000 | | 255.000.000 | | 255.000.000 | | 500.000.000 | |
| Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan | Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) | 16,16 | 50,58 | 1.215.000.000 | 4,26 | 255.000.000 | 3,96 | 255.000.000 | 16 | 255.000.000 | 4 | 500.000.000 | |
| 1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan | | | | 69.993.753.614 | | 77.564.320.517,47 | | 101.379.262.037,03 | | 108.847.195.445,67 | | 161.544.865.527,88 | |
| Terlaksananya Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) | 6 | 28,254 | 69.993.753.614 | 26,5 | 77.564.320.517,47 | 35,16 | 101.379.262.037,03 | 41,44 | 108.847.195.445,67 | 35,32 | 161.544.865.527,88 | |
| 1.03.10.2.01.0061 - Pemeliharaan Berkala Jembatan | | | | 576.000.000 | | 384.000.000 | | 384.000.000 | | 192.000.000 | | 500.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan | Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter) | 20,78 | 20,78 | 576.000.000 | 27 | 384.000.000 | 11,46 | 384.000.000 | 4 | 192.000.000 | 4 | 500.000.000 | |
| 1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 260.000.000 | | 300.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | |
| Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) | 2 | 4 | 260.000.000 | 2 | 300.000.000 | 6 | 450.000.000 | 6 | 450.000.000 | 6 | 450.000.000 | |
| 1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan | | | | 500.000.000 | | 600.000.000 | | 255.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| Terlaksananya Pembangunan Jembatan | Panjang jembatan yang dibangun (Meter) | 0 | 5 | 500.000.000 | 5 | 600.000.000 | 3 | 255.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | |
| 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | 494.100.636 | | 499.600.000 | | 507.100.000 | | 517.500.000 | | 529.700.000 | |
| Meningkatnya Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%) | 37 | 44,4 | 494.100.636 | 50,8 | 499.600.000 | 57,2 | 507.100.000 | 63,6 | 517.500.000 | 70 | 529.700.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Tersertifikasi | | | 419.100.636 | | 409.600.000 | | 410.100.000 | | 420.500.000 | | 432.700.000 | |
| 1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | 419.100.636 | | 409.600.000 | | 410.100.000 | | 420.500.000 | | 432.700.000 | |
| Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang) | 90 | 150 | 419.100.636 | 150 | 409.600.000 | 150 | 410.100.000 | 150 | 420.500.000 | 150 | 432.700.000 | |
| 1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota yang Disediakan | | | 25.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| 1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | | | | 25.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen) | 0 | 1 | 25.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | |
| 1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Diawasi/ Dimonev | | | 50.000.000 | | 70.000.000 | | 77.000.000 | | 77.000.000 | | 77.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | 50.000.000 | | 70.000.000 | | 77.000.000 | | 77.000.000 | | 77.000.000 | |
| Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga) | 1 | 2 | 50.000.000 | 6 | 70.000.000 | 8 | 77.000.000 | 10 | 77.000.000 | 10 | 77.000.000 | |
| 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | 958.500.695 | | 969.200.000 | | 983.700.000 | | 1.003.800.000 | | 1.027.400.000 | |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tata Ruang | Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (%) | 64 | 71 | 958.500.695 | 73 | 969.200.000 | 75 | 983.700.000 | 77 | 1.003.800.000 | 79 | 1.027.400.000 | |
| 1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Persentse Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| 1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Dokumen Materi Teknis RTRW dan Rencana Rinci (RDTR/RTBL) yang telah disusun dan menjadi Ranperkada/ Ranperda Kabupaten Probolinggo | | | 708.500.695 | | 719.200.000 | | 733.700.000 | | 753.800.000 | | 777.400.000 | |
| 1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | | 708.500.695 | | 719.200.000 | | 733.700.000 | | 753.800.000 | | 777.400.000 | |
| Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | 1 | 708.500.695 | 1 | 719.200.000 | 1 | 733.700.000 | 1 | 753.800.000 | 1 | 777.400.000 | |
| 1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang disetujui | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| 1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen) | 153 | 150 | 100.000.000 | 150 | 100.000.000 | 150 | 100.000.000 | 150 | 100.000.000 | 150 | 100.000.000 | |
| 1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Penilaian KKPR (Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang) | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| 1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen) | 50 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | |

***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

Adapun dalam program dan kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo menjadi program prioritas dari pemerintah daerah dalam pencapaian visi dan misi Bupati selama 5 (lima) tahun kedepan.

**Tabel 4.3.**
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |
| 1. | 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan | 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | • Gugus satgas infrastruktur Pengawasan pembangunan infrastruktur - urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;<br>• Cak bogel: call & datang menambal jalan berlubang - urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;<br>• 870 km jalan mulus dalam 3 tahun – urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang<br>• Akses transportasi terintegrasi trans probolinggo-trans jatim plus – urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang |
| | | | 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan | |
| | | | 1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan | |
| | | | 1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan | |
| | | | 1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan | |
| | | | 1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan | |
| | | | 1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan | |
| | | | 1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan | |
| | | | 1.03.10.2.01.0061 - Pemeliharaan Berkala Jembatan | |
| | | | 1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan | |
| | | | 1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan | |
| 2. | 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tata Ruang | 1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | • Membangun perwilayahan industry – urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang |
| | | | 1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | |
| | | | 1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | |
| | | | 1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | |
| | | | 1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | |
| | | | 1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | |

***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam dokumen perencanaan pembangunan suatu daerah, harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja penyelenggaraannya.

Indikator yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi Bupati dalam melaksanakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029. Serta indikator kinerja yang terdapat pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo juga menjadi acuan dalam perumusan target kinerja perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029, telah ditetapkan sejumlah indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh perangkat daerah. Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) macam indikator yang disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo yaitu:

1. Indikator Kinerja Utama

   Sesuai dengan Inmendagri nomer 2 tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi. Dalam level perangkat daerah IKU merujuk pada pencapaian sasaran yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah. Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo:

**Tabel 4.4.**
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Indeks Infrastruktur Dasar | % | 70,28 | 70,97 | 71,60 | 72,23 | 72,91 | 73,61 | |
| 2 | Indeks Konektivitas Wilayah | % | 68,26 | 68,90 | 69,62 | 69,99 | 70,91 | 71,53 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 4 | Persentase Peningkatan Bangunan Irigasi Kondisi Baik | % | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 5 | Persentase Peningkatan Kondisi Jalan Mantap | % | 1,19 | 1,23 | 1,23 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | |
| 6 | Persentase Peningkatan Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | % | 1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
| 7 | Persentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang | % | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

2. Indikator Kinerja Kunci

Sesuai dengan Inmendagri nomer 2 tahun 2025, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam level perangkat daerah IKK merujuk pada program atau kegiatan yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Berikut Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo:

**Tabel 4.5.**
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Persentase Peningkatan Bangunan Irigasi Kondisi Baik | % | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 2. | Persentase Peningkatan Kondisi Jalan Mantap | % | 1,19 | 1,23 | 1,23 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | |
| 3. | Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang | % | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6. | Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7. | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | % | 74,27 | 75,5 | 76,73 | 78,23 | 80,13 | 82,23 | |
| 8. | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | % | 38 | 44,4 | 50,8 | 57,2 | 63,6 | 70 | |
| 9. | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

***Sumber:*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo*

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PROBOLINGGO

# BAB V
# PENUTUP

# BAB V

## PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan/ Sub Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan. Dimana antar kegiatan dalam satu program harus ada keterpaduan dan sinkronisasi satu sama lain, begitu juga dalam satu kegiatan harus ada sinkronisasi antara sub kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing – masing unit pelaksana. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana selama periode renstra yakni 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD tahun 2025 – 2029. Adapun kaidah – kaidah dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo sebagai Berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo bersama – sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 - 2029, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Guna peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaanya.
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029.

Adapun pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 – 2029 melibatkan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target kinerja, analisis permasalahan, dan penyesuaian strategi sesuai kebutuhan. Proses ini didukung oleh penyusunan Laporan Kinerja dan pemanfaatan data dan informasi secara akurat, serta koordinasi antar bidang dan instansi terkait, guna memastikan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program pembangunan infrastruktur. Langkah – langkah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi renstra dapat dijabarkan sebagai Berikut:

a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan menjadi rencana kerja tahunan yang merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. Monitoring dan pengumpulan data kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan dipantau secara rutin untuk mengumpulkan data terkait output dan outcome pembangunan;
c. Analisis dan pelaporan capaian kinerja, data yang terkumpul dianalisis untuk mengukur pencapaian target Renstra dan disusun menjadi laporan kinerja yang komprehensif;
d. Evaluasi dan identifikasi permasalahan, evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja dan mengidentifikasi adanya permasalahan antara rencana dan realisasi;
e. Penyesuaian dan tindak lanjut, berdasarkan hasil evaluasi, strategi dan program dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
f. Koordinasi dan komunikasi, Melibatkan koordinasi dengan bidang – bidang lain dalam dinas serta instansi terkait seperti Bappelitbangda dan SKPD lain untuk memastikan keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan.

# RENCANA STRATEGIS
# DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO
# TAHUN 2025-2029

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bentuk penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan terkait urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo yang sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo dengan BAPELITBANGDA dan pemangku kepentingan terkait.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-206 diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan pedoman dalam menfasilitasi dan mengimplementasikan berbagai kebijakan

strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah yang lain dan juga memberikan konstribusi yang optimal dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan dokumen ini. Demikian Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dibuat dengan penuh tanggung jawab, semoga dapat membawa manfaat dan kemajuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 29 September 2025

KEPALA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**Dr. ROBY SISWANTO, ST, MT.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19730430 199901 1 001

# DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... v
DAFTAR LAMPIRAN ..... vii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... 4
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 11
1.4 Sistematika Penulisan ..... 12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 15
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ..... 15
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah. 17
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 26
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 31
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 52
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ..... 55
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. 55
2.2.2 Isu Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo ..... 59

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN ..... 63

3.1 Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo ..... 63
3.2 Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo ..... 65
3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo ..... 70
3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo ..... 70

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 75
4.1 Uraian Program ..... 76
4.2 Uraian Kegiatan ..... 82
4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif ..... 91
4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah ..... 114
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah ..... 115
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemeritahan Daerah melalui IKK ..... 116

BAB V PENUTUP ..... 127
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 127
5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi ..... 128

# DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan ..... 27
2.2 Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan ..... 27
2.3 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Tertentu ..... 27
2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Gender ..... 27
2.5 Jumlah Sarana dan peralatan penunjang operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. ..... 28
2.6 Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo RTRW ..... 33
2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo KLHS ..... 35
2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... 38
2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo ..... 44
2.10 Teknik Menyimpulkan lsu Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo ..... 59
3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo ..... 67
3.2 Formulasi Indikator Tujuan Dinas Tahun 2025-2029 ..... 68
3.3 Formulasi Indikator Sasaran Dinas Tahun 2025-2029 ..... 69

3.4 Penahapan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo ..... 72
3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra ..... 73
4.1 Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo ..... 80
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. ..... 91
4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. ..... 114
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. ..... 115
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. ..... 117
4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. ..... 120
4.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. ..... 122
4.8 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. ..... 126

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 8, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan RPJPD.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo periode 5 tahun, Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025- 2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Probolinggo berfungsi untuk menjabarkan

visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025-2029 dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan 3 (tiga) bidang urusan yaitu urusan bidang pekerjaan umum dan tata ruang khususnya air minum, sanitasi dan bangunan gedung, urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang urusan pertanahan.

Penyusunan Renstra 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara teknis dijabarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD

dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan seperti perbedaan struktur bab dalam dokumen Renstra dan adanya proyeksi hingga tahun 2030 untuk mengakomodasi masa transisi Kepala Daerah dan persiapan penyusunan Renja 2030, mengisyaratkan bahwa kesiapan substansi, pemahaman konteks dan sinergi antar pihak sangat dibutuhkan agar dokumen perencanaan ini tidak sebatas taat pedoman dan aturan, namun harus relevan terhadap kondisi dan perkembangan, partisipatif dan berdaya guna.

Dalam menyusun Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025-2029 terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang diawali dengan pertemuan dan pembahasan Kepala Dinas dan seluruh jajarannya, serta penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pendampingan BAPELITBANGDA. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen RPJMD 2025-2029, dimana RPJMD sendiri berdasarkan InMendagri Nomor 2 Tahun 2025 wajib selaras dengan RPJPD (Rencana Jangka Panjang Daerah) yang mengacu pada RPJPN 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029 dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi lokal serta kearifan lokal.

Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah

tentang tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga.

PRencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam kerangka tugas pokok dan fungsi sebagai instansi teknis agar bisa selaras dan sinergi dalam melaksanakan pembangunan serta mengikuti dinamika perkembangan daerah dan nasional.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 259);
16. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek STrategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Noor 107);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225)

16. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
17. Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2020 tentang tentang Badan Pertanahan Nasional;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-25 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman penyerahan Prasarana Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Kepemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tmur Nomor 127);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 5 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
40. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menyediakan dokumen rancangan dokumen rencana pembangunan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029 dalam penyelenggaraan pembangunan terkait dengan urusan kewenangan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, yang sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Berdasarkan dari maksud tersebut maka tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh bidang-bidang di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini menyajikan data-data dan memuat informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat :

- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- Sumber Daya Perangkat Daerah
- Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- Isu Strategis Perangkat Daerah

**BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo beserta indikator kinerjanya. Selain itu juga berisi strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun mendatang.

**BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 serta indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
d. pelaksanaan administrasi dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
e. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan memiliki komponen-komponen organisasi yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Tata Bangunan dan Pertanahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
f. Kelompok Jabatan Fungsional;
g. UPT.

### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
d. Pelaksanaan administrasi dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
e. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan

kegiatan;

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tata laksana;
e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
f. penyusunan, pelaksanaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
c. penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
d. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
e. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
f. penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;

e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat**

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan serta koordinasi kebijakan teknis rumah umum dan rumah komersil, rumah swadaya dan rumah khusus serta pengembangan permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan perencanaan, koordinasi, rekomendasi dan fasilitasi kebijakan teknis perumahan dan kawasan permukiman;
b. pelaksanaan fasilitasi penyerahan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
c. pelaksanaan fasilitasi diseminasi peraturan perundang-undangan kebijakan strategis, program dan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) rumah umum, rumah komersil, rumah susun, rumah khusus dan pengembangan permukiman;
d. pengoordinasian, pelaksanaan, pembangunan/rehabilitasi rumah umum, rumah komersial, rumah swadaya, dan khusus serta permukiman;
e. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan

pembangunan/rehabilitasi rumah komersial, rumah swadaya, dan khusus serta permukiman;

f. pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan prosedur pengelolaan, pemanfaatan dan rekomendasi teknis peizinan perumahan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan**

Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanganan air minum, penanganan air limbah domestik dan sarana prasarana persampahan dan drainase.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis air minum dan penyehatan lingkungan;

b. pelaksanaan perumusan perencanaan, koordinasi, rekomendasi dan fasilitasi kebijakan teknis perumahan dan kawasan permukiman;

c. pelaksanaan fasilitasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;

d. pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;

e. pelaksanaan fasilitasi diseminasi peraturan perundang-undangan kebijakan strategis, program dan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) rumah umum, rumah komersil, rumah susun, rumah khusus dan Pengembangan Permukiman;

f. pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi rumah umum komersial, rumah swadaya dan khusus serta permukiman;
g. pelaksanaan pengawasan pembangunan/rehabilitasi rumah umum komersial, rumah swadaya dan khusus serta permukiman;
h. pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan prosedur pengelolaan, pemanfataan dan rekomendasi teknis perizinan perumahan;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Tata Bangunan dan Pertanahan**

Kepala Bidang Tata Bangunan dan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan tata bangunan, pelaksanaan dan pengawasan tata bangunan, dan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Pertanahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pertanahan dalam daerah;
b. pelaksanaan kebijakan teknis penataan dan pengembangan bangunan gedung;
c. pelaksanaan bangunan gedung dalam daerah, termasuk pemberian rekomendasi teknis penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
d. pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan dalam daerah;

e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan urusan pertanahan dan pengembangan bangunan gedung;
f. pelaksanaan pemberian edvise teknis dan bantuan pengelola teknis pembangunan bangunan gedung di daerah kepada instansi vertical terkait;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator. Sub Koordinasi Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional melaksanakan tugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauam, evaluasi dan pelaporan pada satu kempompok substansi pada masing2 pengelompokan uraian fungsi. Sub Koordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan

Fungsional dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik**

UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan UPT Kelas B. UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas. UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang meliputi Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dalam melaksanakan tugas, UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan monitoring evaluasi air limbah domestik.

Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik. Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja operasional pengelolaan air limbah domestik;
b. pelaksanaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik untuk SPALD-S;
c. pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik pada IPLT;
d. pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik pada IPALD;

e. pembinaan kelompok masyarakat pengelola sarana air limbah domestik;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Komponen-komponen organisasi dalam Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo ini dapat digambarkan dalam suatu bagan/struktur organisasi, sebagai berikut :

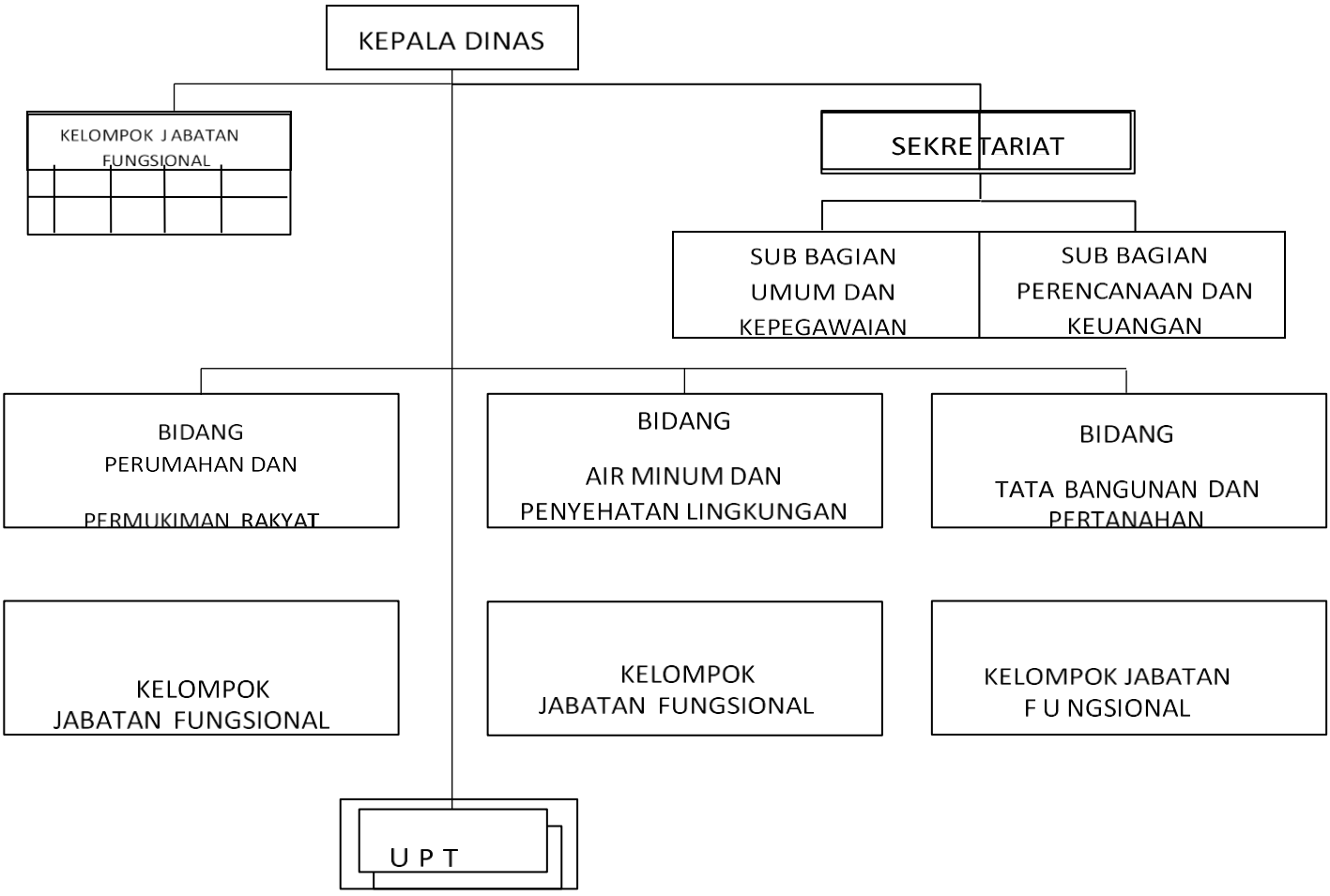

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana.

Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo

**Kondisi Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo**

Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo sebagai unsur pelaksana di jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dalam kiprah kerjanya sangat bergantung dari kemampuan sumber daya manusianya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo kondisi per September 2025 sebanyak 61 Orang, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan**

| No | Pegawai | Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD | SLTP | SLTA | D1/D2 | D3 | D4/S1 | S2 | S3 | | |
| 1 | ASN | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 19 | 6 | 1 | 35 | |
| 2 | PTT-THL | 2 | 2 | 14 | | | 8 | | | 26 | |
| | **Jumlah** | **2** | **2** | **20** | **0** | **3** | **27** | **6** | **1** | **61** | |

Sumber : DPKPP, 2025

**Tabel 2.2 Pangkat dan Golongan**

| No | Pegawai | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Gol VII | Gol IX | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASN | 10 | 16 | 5 | | | 31 | |
| 2 | PPPK | | | | 2 | 2 | 4 | |
| | **Jumlah** | **10** | **16** | **5** | **2** | **2** | **35** | |

Sumber : DPKPP, 2025

**Tabel 2.3 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Tertentu**

| No | Pegawai | Jabatan Struktural | Jabatan Fungsional | Jabatan Pelaksana | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASN | 7 | 7 | 17 | 31 | |
| 2 | PPPK | | 4 | | 4 | |
| | **Jumlah** | **7** | **11** | **17** | **35** | |

Sumber : DPKPP, 2025

**Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Gender**

| No | Pegawai | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASN | 20 | 15 | 35 |
| 2 | PTT-THL | 25 | 1 | 16 |
| | **Jumlah** | **45** | **16** | **61** |

Sumber : DPKPP, 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat baik, setiap ASN yang bekerja dilengkapi dengan peralatan yang mendukung kinerja. Peralatan yang dimaksud adalah sarana seperti komputer beserta kelengkapannya dan juga software-software pendukungnya serta peralatan perlengkapan pendukung tugas, pokok dan fungsi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.5**
**Jumlah Sarana dan peralatan penunjang operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo**

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH KIB | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURSI LIPAT | 40 | 34 | | 6 |
| 2 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 17 | 2 | | 15 |
| 3 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 5 | 4 | | 1 |
| 4 | Kursi Kerja Pejabat lainnya | 70 | 27 | | 43 |
| 5 | Kursi Rapat | 126 | 22 | - | 96 |
| 6 | Kursi Tamu | 7 | 3 | | 4 |
| 7 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III | 43 | 20 | | 23 |
| 8 | Meja Komputer | 6 | 6 | | |
| 9 | Meja Sekolah | 55 | 13 | 27 | 15 |
| 10 | Headset + Mic. Siswa Bootes | - | | | - |
| 11 | Camera Video | 12 | 7 | | 5 |
| 12 | Layar Film/Projector | 8 | 3 | | 5 |
| 13 | Peralatan Cetak lainnya | 1 | - | - | 1 |
| 14 | Mesin Drawing | 1 | - | - | 1 |
| 15 | Meubeleur lainnya | - | | | - |
| 16 | Papan Pengumuman | 1 | 1 | | |
| 17 | Wireless | 4 | 2 | | 2 |
| 18 | Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah) | 1 | | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Alat Rumah Tangga Lain-lain (DROPING PERLENGKAPAN) | 5 | | | 5 |
| 20 | Alat Rumah Tangga Lain-lain (PIGORA) | 17 | 7 | | 10 |
| 21 | Alat Rumah Tangga Lain-lain (KERETA DORONG | 5 | 5 | | |
| 22 | Meja Tamu Biasa | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | Peralatan Personal Komputer lainnya | - | | | - |
| 24 | Peralatan Personal Komputer lainnya (BATREI LAP TOP) | 4 | | | 4 |
| 25 | Peralatan Personal Komputer lainnya (ADAPTOR) | - | | | - |
| 26 | Mesin Kompresor | 1 | | 1 | |
| 27 | Rol Meter | 1 | | | 1 |
| 28 | Global Positioning System | 10 | 6 | | 4 |
| 29 | Alat Penghancur Kertas | 2 | 1 | | 1 |
| 30 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 1 | | | 1 |
| 31 | Mesin Pemotong Rumput | 5 | 3 | 2 | |
| 32 | Alat Pembersih lainnya | 1 | | | 1 |
| 33 | Rice Cooker (Alat Dapur) | 1 | 1 | | |
| 34 | Tangga Aluminium | 2 | | 2 | |
| 35 | Handy Cam | 2 | | | 2 |
| 36 | peralatan antena vhf/fm lainnya (dst) | - | | | - |
| 37 | Slump Test Set | 1 | 1 | | |
| 38 | alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst) | - | | | - |
| 39 | Power Supply (Alat Laboratorium Immunologi) | - | | | - |
| 40 | alat laboratorium lain lainnya (dst) | 1 | | | 1 |
| 41 | Monitor | - | | | - |
| 42 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 7 | 6 | | 1 |
| 43 | Genset | 5 | 3 | | 2 |
| 44 | Rak Besi | 44 | 24 | | |
| 45 | Gordyin | 41 | 41 | | |
| 46 | Pesawat Telephone | 1 | | | 1 |
| 47 | Mesin Absensi | 3 | 2 | | 1 |
| 48 | Lemari Kayu | 4 | 1 | | |
| 49 | kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (Toilet Portable) | 4 | | 4 | |
| 50 | Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya) | 1 | 1 | | |
| 51 | Lemari Kaca | 15 | 15 | | |
| 52 | Alat Kantor Lainnya ( baterai genset) | 1 | | | 1 |
| 53 | Papan Nama Instansi | 1 | 1 | | |
| 54 | CCTV | 8 | 8 | | |
| 56 | Sound System | 1 | 1 | | |
| 57 | Aplanation Termometer (Thermogun) | 1 | | 1 | |
| 58 | Lemari Arsip Pintu Sliding | 2 | 2 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | UPS | 4 | 4 | | |
| 60 | Alat Studio Video Lainnya (LOGITECH TELECONFERENCE) | 1 | 1 | | |
| 61 | alat ukur lain-lain lainnya (SKETMAT DIGITAL,TEODOLIT,DISTOMETER) | 6 | 5 | | |
| 62 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) | 1 | | | 1 |
| 63 | Meja Rapat | 4 | 4 | | |
| 64 | Alat Pendingin lainnya | 1 | 1 | | |
| 65 | Alat Dapur lainnya TEMPAT CUCI PIRING | 1 | 1 | | |
| 66 | Dispenser | 7 | 2 | | 5 |
| 67 | Lemari Buku Untuk Perpustakaan | 1 | 1 | | |
| 68 | Camera Electronic | 12 | 7 | | 5 |
| 69 | Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah) | 2 | | 2 | |
| 70 | Hammer Mill (Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik) | 1 | 1 | | |
| 71 | Pita Ukuran (Meteran) | 1 | | | 1 |
| 72 | Hard Disk | 8 | 2 | | 6 |
| 73 | Mesin Penghitung Uang | 1 | 1 | | |
| 74 | Lemari Sorok | 6 | 6 | | |
| 75 | Rak Piring Alumunium | 3 | 3 | | |
| 76 | Pompa Air | 1 | | 1 | |
| 77 | Container | | | | |
| 78 | Lemari Besi/Metal | 6 | 6 | | |
| 79 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 | 1 | | |
| 80 | Microphone Floor Stand | 6 | 4 | | 2 |
| 81 | Meja Kerja Kayu | 19 | 18 | | 1 |
| 82 | Karpet | 2 | 2 | | |
| 83 | Facsimile | 2 | 1 | | 1 |
| 84 | Magnetic Tape Unit (Peralatan Mainframe) | 1 | | | |
| 85 | CPU (Peralatan Mainframe) | 1 | | | 1 |
| 86 | Speaker Komputer | 1 | | | 1 |
| 87 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 12 | 10 | | 2 |
| 88 | Kursi Kerja Pejabat Eselon V | 11 | 10 | | 1 |
| 89 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III | 4 | 2 | 2 | |
| 90 | Kursi Biasa | - | | | - |
| 91 | Filing Cabinet Besi | 27 | | | |
| 92 | Telephone (PABX) | - | - | - | - |
| 93 | Kipas Angin | 8 | 2 | - | 6 |
| 94 | Alat Pemadam/Portable | 2 | 2 | - | - |
| 95 | Alat Pemotong Kertas | 1 | - | - | 1 |
| 96 | Display | - | - | - | - |
| 97 | LAPTOP | 40 | 31 | 2 | 7 |
| 98 | PC UNIT | 37 | 19 | | 21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | LCD | 8 | 4 | | 3 |
| 100 | KAMERA | 12 | 7 | | 5 |
| 101 | PRINTER | 81 | 35 | | 46 |
| 102 | DRONE | 1 | 1 | | |
| 103 | TELEVISI | 8 | 4 | | 4 |
| 104 | NOTEBOOK | 8 | 1 | | 7 |
| 105 | SEPEDA MOTOR | 17 | 17 | | |
| 106 | A.C. | 37 | 26 | | 11 |
| 107 | BRANDKAS | 3 | 2 | | 1 |
| 108 | MOBIL TINJA | 3 | 3 | - | - |
| 109 | Station Wagon | 5 | 5 | | |
| 110 | kendaraan dinas bermotor perorangan (roda 3) | 3 | 3 | - | - |
| 111 | PICK UP | 1 | 1 | - | - |
| 112 | MOBIL PENGANGKUT AIR BERSIH | 1 | 1 | - | - |
| | **TOTAL** | **369** | **506** | | **390** |

*Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Probolinggo, 2025*

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah sangat diperlukan dengan maksud untuk mengidentifikasi tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (2020-2024), menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, potensi dan permasalahan pada aspek pelayanan Perangkat Daerah dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah, sebagai landasan dalam menetapkan target layanan rencana strategis periode selanjutnya.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan tugasnya melaksanaan 2 (dua) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta 1 (satu)

urusan diluar pelayanan dasar yaitu urusan bidang pertanahan.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 11 sub urusan yaitu: 1) sumber daya air; 2) **air minum** (Bidang AMPL); 3) **persampahan** (Bidang AMPL-**pengadaan sarana prasarana**); 4) **air limbah** (Bidang AMPL); 5) drainase; 6) permukiman; 7) **bangunan gedung** (Bidang Tata Bangunan); 8) penataan bangunan dan lingkungannya (Bidang Tata Bangunan); 9) jalan; 10) jasa konstruksi; dan 11) Penataan Ruang.

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 sub urusan, yaitu : 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana**,** dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kinerja Layanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 18 Tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang SPM, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, dapat kami sajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.6**
Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target SPM PD Tahun ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| **Bidang Urusan Pekerjaan Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Bidang Urusan Perumahan Rakyat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Probolinggo, 2025*

Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Bidnag Urusam Perumahan Rakyat 100% setiap tahunnya, sesuai target kinerja tahun berkenaan. Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum yaitu dalam pengumpulan data *update* air minum dan sanitasi-sanitasi dari desa-desa setiap tahunnya, untuk menjangkau data sampai ke desa atau rumah membutuhkan 25.000 sampai 27.000 per titik (informasi BPS). Oleh sebab itu, peran aktif Pokja PKP (Perumahan, Kawasan Permukiman) yang terdiri dari lintas OPD yang berkonstribusi dalam kinerja penyelenggaraan air minum dan sanitasi di Kabupaten sangat diperlukan, misalnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Demikian juga Bidang Urusan Perumahan Rakyat, standard dalam pelaksanaan SPM Rehabilitasi Rumah Bencana masih menggunakan standart program Bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), sehingga pemberian bantuan bersifat stimulan dan membutuhkan swadaya masyarakat, sehingga dipelukan penyusunan standard tersendiri dalam pemberian bantuan rehabilitasi

rumah bencana, diantaranya dengan menyesuaikan tingkat kerusakan rumah, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana hingga tahun 2024 berjumlah 34 unit yang dilaksanakan sejak sejak tahun 2000.

**Tabel 2.7**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Anggaran | Realisasi |
| **Bidang Urusan Pekerjaan Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 9.832.183.423 | 5.483.674.156 | 6.375.685.000 | 9.203.850.500 | 9.546.039.000 | 7.875.783.500 | 5.204.925.948 | 5.862.352.931 | 8.998.462.442 | 9.495.985.273 | 80,10 % | 94,92 % | 91,95 % | 97,77 % | 99,48 % | 40.441.432.079 | 37.437.510.094 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | 10.076.500.000 | 4.660.139.881 | 7.314.575.000 | 8.903.608.000 | 14.692.458.000 | 9.798.461.133 | 4.629.083.950 | 7.066.274.589 | 8.691.412.823 | 14.577.614.257 | 97,24 % | 99,33 % | 96,61 % | 97,62 % | 99,22 % | 45.647.280.881 | 44.762.846.752 |
| | **Jmlh** | **19.908.683.423** | **10.143.814.037** | **13.690.260.000** | **18.107.458.500** | **24.238.497.000** | **17.674.244.633** | **9.834.009.898** | **12.928.627.520** | **17.689.875.265** | **24.073.599.530** | **88,78%** | **96,95%** | **94,44%** | **97,69%** | **99,32%** | **86.088.712.960** | **82.200.356.846** |
| **Bidang Urusan Perumahan Rakyat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | 261.000.000 | 317.048.000 | 800.000.000 | 500.000.000 | 300.000.000 | 257.253.000 | 291.632.500 | 692.889.450 | 462.175.650 | 195.354.160 | 98,56 % | 91,98 % | 86,61 % | 92,44 % | 65,12 % | 2.178.048.000 | 1.899.304.760 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - |
| | **Jmlh** | **261.000.000** | **317.048.000** | **800.000.000** | **500.000.000** | **300.000.000** | **257.253.000** | **291.632.500** | **692.889.450** | **462.175.650** | **195.354.160** | **98,56%** | **91,98%** | **86,61%** | **92,44%** | **65,12%** | **2.178.048.000** | **1.899.304.760** |
| **Total Alokasi SPM** | | **20.169.683.423** | **10.460.862.037** | **14.490.260.000** | **18.607.458.500** | **24.538.497.000** | **17.931.497.633** | **10.125.642.398** | **13.621.516.970** | **18.152.050.915** | **24.268.953.690** | **88,90%** | **96,80%** | **94,00%** | **97,55%** | **98,90%** | **88.266.760.960** | **84.099.661.606** |

*Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Probolinggo, 2025*

**Tabel 2.8**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra PD Tahun ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | Persentase Kenaikan LHE AKIP PD | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,42 |
| 2 | Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | | | | 90,16 | 90,24 | 91,54 | 92,3 | 92,54 | 89,16 | 90,34 | 92,03 | 92,4 | 92,58 | 98,89 | 100,11 | 100,54 | 100,1083 | 100,0432 |
| | Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum Layak | | | | 62,29 | 63,01 | - | - | - | 62,03 | 63,01 | - | - | - | 99,58 | 100 | - | - | - |
| 3 | Persentase peningkatan rumah tangga yang menggunakan air minum layak | | | | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,48 | - | - | 0,54 | 0,47 | 0,69 | - | - | 108 | 117,5 | 143,75 |
| | Persentase Rumah Tangga Berakses | | | | 61,87 | 62,17 | - | - | - | 62,06 | 62,29 | - | - | - | 100,31 | 100,2 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sanitasi Layak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Persentase peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | | | | - | - | 0,5 | 0,24 | 0,32 | - | - | 0,33 | 0,56 | 0,54 | - | - | 66 | 233,3333 | 168,75 |
| 5 | Persentase Peningkatan Bangunan Pelayanan Publik Berkualitas Baik | | | | 50,53 | 63,16 | 10 | 7,37 | 5 | 50,53 | 62,11 | 12,63 | 7,37 | 5,26 | 100 | 98,34 | 126,3 | 100 | 105,2 |

*Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Probolinggo, 2025*

### 2.1.3.1 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian peningkatan rumah tangga yang menggunakan air minum layak memiliki tren positif setiap tahunnya, namun demikian cakupan layanan rumah tangga yang menggunakan air minum layak pada Tahun 2024 masih mencapai 64,71% dimana terdapat angka kesenjangan yang cukup jauh dengan target nasional dimana air minum layak di Indonesia sudah harus mencapai 100% di Tahun 2025 untuk periode target 2020-2024. Kini Pemerintah telah melakukan transformasi layanan menuju target 100% air minum aman bagi seluruh masyarakat pada Tahun 2025 dan seterusnya, termasuk mencapai akses universal air minum yang aman dan terjangkau sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030.

Capaian peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak pada Tahun 2024 baru mencapai 63,72%. Pencapaian sanitasi juga didukung melalui terlaksananya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dimana dalam setiap pemberian bantuan rumah juga dilengkapi dengan pembangunan jamban. Capaian peningkatan bangunan publik berkualitas baik 68,42% pada Tahun 2024. Pencapaian kualitas bangunan publik pada tahun 2024 dilakukan diantaranya dengan Pembangunan dan Rehabilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kraksaan, Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Parkir dan Sarana Prasarana Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Rehabilitasi Guest House Kraksaan (Lanjutan), Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati di Kota Probolinggo, Rehabilitasi Rumah Dinas Sekretaris Daerah di Kota Probolinggo,

Rehabilitasi Pendopo dan Rumah Dinas Bupati di Kota Probolinggo, Pembangunan dan Rehabilitasi Penahan Tanah/Plengsengan dan Pagar Samping Kantor Kecamatan Sukapura, Rehabilitasi Kantor UPTD Pengolahan Lumpur Tinja di Desa Seboro Kec. Krejengan, Rehabilitasi Atap Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kawasan MPP, Rehabilitasi Ruang Bidang Pendapatan di Gedung Mal Pelayanan Publik, Rehabilitasi Rumah Dinas Perikanan di Kota Probolinggo, Rehabilitasi Kantor Dinas Sosial di Kota Probolinggo, Rehabilitasi Gedung Eks. Kantor Bidang Pendapatan di Jl. Kolonel Sugiono Kota Probolinggo (PERTUNI), Rehabilitasi Wisma Utjik di Kec. Sukapura dan Pembangunan Gerbang Kawasan Stadion Gelora Merdeka Kraksaan.

#### 2.1.3.2 Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni pada Tahun 2024, 92,58%. Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dilakukan secara bertahap mulai Tahun 2013 dengan bantuan bersifat stimulan dan pemberdayaan masyarakat. Hingga tahun 2024, jumlah rumah yang telah direhabilitasi melalui program Rehabilitasi RTLH adalah sejumlah 7.744 Unit. Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program BSPS untuk mendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi RUTILAHU dengan jumlah yang telah direhabilitasi sebanyak 12.368 Unit.

Baseline kebutuhan penanganan Kawasan permukiman kumuh tahun 2022 adalah seluas 237,4 Ha berdasarkan SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Nomor 650/797/426.32/2022 dan telah dilakukan *update baseline*

pada tahun 2023, sehingga Kawasan kumuh menurun menjadi 201,77 Ha. Capaian pengurangan Kawasan kumuh tahun 2024 seluas 2,73 Ha. Sisa luasan kumuh yang belum ditangani sampai tahun 2024 seluas 199,04 Ha.

Penyediaan PSU yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dilakukan pada 9 perumahan. Pada tahun 2023 telah dilakukan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Probolinggo , namun demikian pelaksanaan harmonisasi hal dimaksud masih ditangguhkan karena materi yang tercantum dalam naskah akademis dan draft raperda penyelenggaraan perumahan dan permukiman kurang sesuai dengan wewenang daerah sesuai yang tercantum dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada saat ini sedang dilakukan Review atas Naskah Akademis dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Probolinggo.

### 2.1.3.2 Kinerja Urusan Pertanahan

Kinerja terkait urusan pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sub kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

2. Melaksanakan sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
3. Melaksanakan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Melaksanakan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah;
5. Melaksanakan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kinerja urusan pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal disebabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di daerah masih belum sepenuhnya sesuai kewenangan tugas pokok dan fungsi, sehingga dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjalankan fungsi koordinasi jika diperlukan.

**Tabel 2.9**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Anggaran | Realisasi |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, Air Limbah, Penataan Kawasan | 20.837.183.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.577.332.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,09 % | 0 | 0 | 20.837.183.423 | 18.577.332.133 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permukiman dan Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur | 1.985.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904.092.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,52 % | 95,92 % | 0 | 0 | 1.985.000.000 | 1.904.092.702 |
| Program Pengelolaan dan Penataan Bangunan | 3.328.175.000 | 0 | 0 | | | 2.709.505.100 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 81,41 % | 0 | 0 | 3.328.175.000 | 2.709.505.100 |
| Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan | 1.929.825.000 | 0 | 0 | | | 1.337.675.320 | 0 | 0 | | | 87,43 % | 88,65 % | 69,32 % | 0 | 0 | 1.929.825.000 | 1.337.675.320 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dan Pemanfaatan Lahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.345.904.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.987.090.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,54 % | 90,92 % | 84,07 % | 0 | 0 | 2.345.904.600 | 1.987.090.175 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 0 | 6.000.067.520 | 6.280.890.908 | 6.749.140.428 | 7.047.334.019 | 0 | 5.250.394.933 | 5.594.522.216 | 5.924.313.498 | 6.486.715.346 | 0 | 0 | 0 | 87,78 % | 92,04 % | 26.077.432.875 | 23.255.945.993 |
| Program Pengelolaan Dan Pengemban | 0 | 5.483.674.156 | 6.375.685.000 | 9.203.850.500 | 9.546.039.000 | 0 | 5.204.925.948 | 5.837.399.131 | 8.998.462.442 | 9.495.985.273 | 0 | 0 | 0 | 97,77 % | 99,48 % | 30.609.248.656 | 29.536.772.794 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gan Sistem Penyediaan Air Minum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | 0 | 0 | 585.000.000 | 2.175.616.817 | 900.000.000 | 0 | 0 | 561.804.500 | 2.132.877.200 | 825.370.700 | 0 | 0 | 0 | 98,04 % | 91,71 % | 3.660.616.817 | 3.520.052.400 |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 0 | 4.660.139.881 | 7.314.575.000 | 8.903.608.000 | 14.692.458.000 | 0 | 4.629.083.950 | 7.066.274.589 | 8.691.412.823 | 14.577.614.257 | 0 | 0 | 0 | 97,62 % | 99,22 % | 35.570.780.881 | 34.964.385.619 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 0 | 1.352.000.000 | 1.715.000.000 | 1.080.000.000 | 730.000.000 | 0 | 502.979.600 | 1.341.600.250 | 942.231.400 | 651.888.550 | 0 | 0 | 0 | 87,24% | 89,30% | 4.877.000.000 | 3.438.699.800 |
| Program Penataan Bangunan Gedung | 0 | 4.631.782.000 | 7.265.000.000 | 4.125.000.000 | 9.874.990.000 | 0 | 4.090.718.655 | 6.080.983.523 | 3.583.001.784 | 8.955.015.091 | 0 | 0 | 0 | 86,86% | 90,68% | 25.896.772.000 | 22.709.719.053 |
| Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | 0 | 6.675.700.000 | 3.547.099.410 | 4.645.000.000 | 21.205.010.000 | 0 | 2.466.894.190 | 3.398.360.308 | 4.068.148.700 | 19.882.749.939 | 0 | 0 | 0 | 87,58% | 93,76% | 36.072.809.410 | 29.816.153.137 |
| Program Pengembangan Perumahan | 5.792.937.000 | 566.446.900 | 800.000.000 | 500.000.000 | 300.000.000 | 5.272.671.560 | 501.013.100 | 692.889.450 | 462.175.650 | 195.354.160 | 96,32% | 96,80% | 91,02% | 92,44% | 65,12% | 7.959.383.900 | 7.124.103.920 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 925.000.000 | 1.261.700.000 | 850.000.000 | 0 | 0 | 724.237.815 | 963.276.236 | 761.373.682 | 0 | 0 | 0 | 76,35 % | 89,57 % | 3.036.700.000 | 2.448.887.733 |
| Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | 0 | 7.223.807.000 | 10.107.500.000 | 4.808.635.500 | 4.528.749.000 | 0 | 7.202.486.163 | 9.846.559.822 | 4.561.171.438 | 4.484.463.780 | 0 | 0 | 0 | 94,85 % | 99,02 % | 26.668.691.500 | 26.094.681.203 |
| Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | 0 | 5.988.464.000 | 4.415.000.000 | 2.041.360.000 | 1.425.000.000 | 0 | 1.272.163.600 | 3.909.461.991 | 1.896.757.779 | 1.363.207.500 | 0 | 0 | 0 | 92,92 % | 95,66 % | 13.869.824.000 | 8.441.590.870 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Peningkatan, Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasajn Permukiman | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.148.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,15 % | #DIV/0! | 100.000.000 | 24.148.400 |
| Program Pengelolaan Izin Lokasi | 0 | 25.000.000 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.000.000 | 54.192.000 |
| Program Penyelesaian Sengketa Tanah | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 9.291.200 | 14.426.200 | 13.326.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,65 % | 150.000.000 | 37.043.900 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garapan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | 0 | 199.950.000 | 2.100.000.000 | 150.000.000 | 38.000.000 | 0 | 140.425.650 | 95.073.800 | 117.078.000 | 6.027.450 | 0 | 0 | 0 | 78,05% | 15,86% | 2.487.950.000 | 358.604.900 |
| Program Penatagunaan Tanah | 0 | 349.670.000 | 355.000.000 | 200.000.000 | 55.750.000 | 0 | 219.006.300 | 255.713.600 | 134.372.747 | 23.997.500 | 0 | 0 | 0 | 67,19% | 43,04% | 960.420.000 | 633.090.147 |
| | 28.080.183.423 | 0 | 0 | 45.993.911.245 | 71.243.330.019 | 31.788.366.990 | 31.480.092.089 | 45.468.364.195 | 42.513.854.297 | 67.723.089.728 | 113,21% | #DIV/0! | #DIV/0! | 92,43% | 95,06% | 248.523.718.062 | 218.973.767.299 |

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok penerima sasaran layanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo adalah seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo, yang jumlahnya pada Tahun 2024 tercatat berdasarkan data 2021, adalah sekitar 1.185.200 (atau 1.185,2 ribu jiwa), sesuai Urusan Dinas, antara lain :

a. Akses terhadap sumber air minum layak

   Sampai dengan Tahun 2024, capaian akses Rumah Tangga terhadap sumber air minum layak mencapai 64,71%, dengan sumber untuk SPAM PDAM, menurut RISPAM 2023 : Wilayah Barat sumber mata air di Umbulan Sukapura, Wilayah Tengah: Ronggojalu dan sebagian Tancak Tiris, Wilayah Timur: sebagian Tancak Tiris dan Darungan Krucil. Dalam penyelenggaraan layanan SPAM di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, BUMD PERUMDAM TIRTA ARGOPURA, yang terdiri dari 16 Unit Pelayanan serta Kelompok Masyarakat, dengan nama KPSPAM (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum), terdiri dari 172 KPSPAM (Desa).

b. Akses terhadap sanitasi layak

   Pada tahun 2024, capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 63,72%. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan penyediaan sarana prasarana persampahan berupa TPS-3R, penyediaan drainase lingkungan, layanan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik serta penyedotan lumpur tinja bagi masyarakat di dalam maupun luar Kabupaten Probolinggo.

c. Penyedian hunian layak

Rehabilitasi RTLH agar layak huni yang dilakukan sampai dengan tahun 2024 sejumlah 12.368 unit melalui program RTLH Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maupun program APBN (BSPS).

d. Penyelenggaraan bangunan Gedung

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo melakukan pembangunan ataupun rehabilitasi sarana prasarana gedung pemerintahan dan publik agar lebih berkualitas baik, fasilitasi pembinaan dan bantuan teknis bagi Instansi2 serta pemberian rekomendasi teknis Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Probolinggo.

e. Pemeliharaan PSU Perumahan

Sasaran layanan PSU Perumahan adalah perumahan yang sudah diserahkan pada Pemerintah Daerah serta proposal warga perumahan yang sudah ditelantarkan oleh pengembang. Pelayanan Perijinan perumahan / layanan siteplan diberikan kepada pengembang perumahan berbadan hukum yang memenuhi semua persyaratan perijinan dengan ketentuan teknis yang harus dipenuhi, diantaranya ketentuan komposisi lahan efektif dan lahan non efektif dalam rangka keserasian kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman.

f. Rehabilitasi rumah bencana

Pemberian layanan rehabilitasi rumah bencana bagi para korban terdampak bencana alam bersifat pasca bencana, melalui pembangunan ataupun rehabilitasi rumah setelah terjadi bencana di Kabupaten Probolinggo.

**Kerjasama Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai keweangan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan Kerjasama dengan beberapa pihak, diantaranya:

- Kerja Sama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur dalam pembangunan infrastruktur khususnya pelaksanaan Rehabilitasi RTLH terkait pengelolaan keuangan dan jasa layanan keuangan Perbankan dalam rangka rekening penampungan bagi masyarakat penerima bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama nomor 900/154/426.113/2025, 064/326/KRA/OPSDN/PKS.
- Kerja Sama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, khususnya dalam layanan pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berbasiskan KTP-el.
- Kerja Sama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo dalam hal Pengelolaan

Air Limbah Domestik (Lumpur Tinja) diantaranya dengan : RSUD Waluyo Jati Kabupaten Probolinggo, PT. PLN (Persero) UP2D Jawa Timur.

## 2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.1.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo

Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo dalam menyelenggarakan 2 (dua) urusan wajib pelayanan dasar dan 1 (satu) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintahan bersumber dari berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak huni, lingkungan yang sehat dan permukiman yang layak bagi semua masyarakat Kabupaten Probolinggo. Upaya untuk mewujudkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur melalui Kualitas Permukiman Layak huni dan berkelanjutan masih terkendala belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan dasar publik.

Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat dirinci sebagai berikut :

- Capaian pelayanan akses rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi aman masih rendah.
- Budaya masyarakat pedesaan yang masih memanfaatkan sungai sebagai tempat BAB, meskipun telah tersedia tangki septik komunal, menyebabkan pencemaran air sungai. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, terutama karena sungai juga

digunakan sebagai sumber irigasi, sehingga berdampak pada kualitas air dan keberlanjutan pertanian.

- Masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan kelompok ataupun badan pengelola air minum.
- Pembangunan jaringan air bersih masih terkendala akan dana dan juga biaya pemeliharaan yang tergolong cukup besar, permasalahan bertambah dengan potensi debit air yang kecil sehingga tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- Penanganan dan pengelolaan air limbah yang belum optimal (IPAL Komunal, tangki septik komunal, sarana pengangkutan lumpur Tinja Terjadwal).
- Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah Rumah Tangga dan industri Rumah Tangga di perkotaan dan perdesaan.
- Pemahaman masyarakat tentang pentingnya sanitasi masih rendah.
- Penyelenggaraan sarana prasarana persampahan yang belum memadai khususnya sampah regional.
- Belum tersusunnya RTBL beberapa kawasan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan Swasta dalam mengembangkan lingkungan permukiman.
- Kurangnya pengawasan dan pengendalian proses penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Probolinggo.
- Belum diberlakukannya Surat Layak Fungsi (SLF) pada bangunan gedung lama.

Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

- Rata-rata kebutuhan masyarakat akan RLH (Rumah Layak Huni) tergolong sangat tinggi namun belum semuanya terpenuhi.
- Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh di kabupaten Probolinggo yang perlu penataan maupun peremajaan.
- Belum adanya Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- Masih adanya kawasan rawan bencana alam serta belum tertanganinya rumah rusak akibat bencana terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman (PSU).
- Masih banyak pengembang yang belum menyerahkan fasum/fasos ke Pemerintah daerah, sehingga pemeliharaan tidak optimal.

Permasalahan Urusan Pertanahan :

- Belum terpenuhinya data kebutuhan perencanaan pembangunan di bidang pertanahan dan tata bangunan
- Pengembangan paradigma baru dalam perencanaan kota dan desain lingkungan yang lebih inklusif dan ramah lingkungan belum sejalan / belum ditindaklanjuti dengan pemenuhan data rencana kebutuhan tanah Pemerintah Daerah 5 tahun kedepan.
- Kecenderungan pertumbuhan investasi di Kabupaten Probolinggo khususnya berdampak pada permintaan izin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka investasi.
- Adanya potensi konflik pertanahan seiring meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.

- Tumpang tindih urusan pertanahan antara Bidang Aset Badan Keuangan Daerah, Dinas PMPTSP dengan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

### 2.2.2 Isu Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo

**Tabel 2.10**
**Teknik Menyimpulkan lsu Strategis**
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
**Kabupaten Probolinggo**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DPKPP | PERMASALAHAN DPKPP | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DPKPP | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DPKPP | | | ISU STRATEGIS DPKPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. Potensi sumber air tanah dalam bentuk sumur dangkal maupun sumur dalam. Adapun wilayah yang cukup potensial air tanahnya antara lain ialah wilayah bagian utara dan bagian tengah yakni meliputi wilayah Paiton, Kraksaan, Pajarakan, Gending, Dringu, Sumberasih dan Tongas. Selain itu di Kabupaten Probolinggo juga dijumpai sumber-sumber mata air. Mata air tersebut umumnya mengalir terus-menerus sepanjang tahun. Sumber | Belum optimalnya capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan (capaian rumah tangga akses air minum layak, sanitasi layak, penanganan kawasan kumuh) | 1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br>2. Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah<br>• KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 IV-57 | 1. Perkembangan teknologi<br>2. Peningkatan urbanisasi<br>3. Tata kelola keuangan global<br>4. Pertumbuhan kelas menegah (*middle class*)<br>5. Perubahan iklim, daya tampung air dan udara serta daya dukung sumber daya alam | 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada penyelenggara urusan wajib terkait pelayanan dasar<br>2. Akses air minum aman melalui jaringan perpipaan masih sangat terbatas<br>3. Baru sebagian kecil rumah tangga mendapatkan akses terhadap pengelolaan sanitasi aman, baik pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari kakus (blackwater), non-kakus (greywater), ataupun lumpur tinja<br>4. Kinerja sarana dan prasarana seperti konektivitas, ketenagalistrikan, telekomunikasi, perumahan dan | 1. Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh permukiman karena penambahan dan perubahan baseline Kawasan kumuh serta menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan<br>2. Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU serta perumahan dari pengembang yang belum serah terima asset<br>3. Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana (Pendataan | 1. belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta tata kelola, penyelenggaraan dan kelembagaan SPAM<br>2. Belum optimalnya persebaran dan pemanfaatan sarana dan prasarana sanitasi, termasuk keberfungsian IPLT dalam menunjang keberadaan UPT untuk mendukung peningkatan akses sanitasi layak dan aman.<br>3. Masih rendahnya kesadaran, peran, partisipasi, dan permintaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mata air tersebut terutama terdapat di Kecamatan Sumber, Sukapura, Tegalsiwalan, Dringu, Tiris dan Krucil. Hal tersebut merupakan potensi untuk kepentingan sumber air baku, pertanian dan pariwisata.<br><br>***KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ; V-49***<br><br>2. Potensi danau/ranau, antara lain Ranu Segaran, Taman Hidup, Dempet, Gedang, Kembar, Betek, Agung dan lain-lain yang belum didayagunakan sebagaimana mestinya. Selain air hujan dan air permukaan, maka air tanah juga merupakan sumber air yang potensial di Kabupaten Probolinggo. | | | | permukiman, dan sumber daya air, masih tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara lain, utamanya negara continental<br>5. Terdapat ketimpangan pemenuhan akses sarana dan prasarana dasar antarwilayah, antar perdesaan dan perkotaan<br>6. Penerapan jalur pembangunan yang rendah karbon dilaksanakan melalui arah kebijakan yang mencakup diantaranya pembangunan bangunan gedung dan hunian yang rendah karbo<br>7. Masih tingginya permasalahan pertanahan dan masih sangat terbatasnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang tersedia<br>8. Rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan<br><br>***Dokumen RPJPN 2025-2045*** | mitigasi bencana masih dilakukan oleh BPNPB sehingga dibutuhkan upaya koordinasi).<br>4. Pelayanan akses air minum layak dan aman (Target air minum aman sampai 2026 sebesar 38,38% dimana dibutuhkan uji keamanan dari kualitas air minum yang aman dikonsumsi)<br>5. Belum optimalnya Pelayanan akses sanitasi layak dan aman<br>6. Keterpaduan Rencana dan ketersediaan data (Belum optimalnya keterpaduan rencana karena permasalahan koordinasi, keterbatasan SDM, pemanfaatan anggaran diiringi dengan perlunya dukungan ketersediaan data dan informasi terkait air minum dan sanitasi). | 4. Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU serta perumahan dari pengembang yang belum serah terima asset.<br>5. Banyaknya Bangunan Gedung pemerintah yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi.<br>6. Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi, kemampuan teknis serta keahlian kusus dalam proses penyelenggaraan bangunan Gedung.<br>7. Optimalisasi terhadap integrasi urusan pertanahan dengan urusan penataan ruang Kabupaten |

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan, serta hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Isu-isu strategis pada Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta tata kelola dan penyelenggaraan dan kelembagaan SPAM.
2. Belum optimalnya persebaran dan pemanfaatan sarana dan prasarana sanitasi, termasuk keberfungsian IPLT dalam menunjang keberadaan UPT untuk mendukung peningkatan akses sanitasi layak dan aman.
3. Masih rendahnya kesadaran, peran, partisipasi, dan permintaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah.
4. Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU serta perumahan dari pengembang yang belum serah terima aset.
5. Banyaknya Bangunan Gedung pemerintah yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi.

6. Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi, kemampuan teknis serta keahlian kusus dalam proses penyelenggaraan bangunan Gedung.
7. Optimalisasi terhadap integrasi urusan pertanahan dengan urusan penataan ruang Kabupaten.

# BAB III
# TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing"**. Visi Kabupaten Probolinggo menjadi dasar yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. "**Eksis Berdaya Saing"** merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan lingkungan sosial yang sehat dengan budaya yang maju. Menggunakan cara-cara baru dan inovatif untuk perbaikan Pembangunan. Memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam setiap langkah pembangunan. Kabupaten Probolinggo memiliki daya saing yang kuat dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam keberhasilan capaian pembangunannya. SAE ekonomi dan infrastrukturnya**,** yaitu maju secara ekonomi, didukung infrastruktur yang berkualitas, merata, serta berpijak pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.

Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan, memberikan arah yang jelas, sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan dengan Pokok-pokok visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif (SAE Pemerintahan)
2. Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang Kreatif dan Inovatif di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Berbasis Desa dan Komunitas Untuk Menciptakan Lapangan Kerja dan Memberantas Kemiskinan (SAE Ekonomi)
3. Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar lainnya yang Terjangkau (SAE Pendidikan dan Kesehatan)
4. **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah Basis Produksi, Daerah Terluar, Daerah Terpencil, serta Perwilayahan Industri secara Merata (SAE Infrastruktur)**
5. Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas (SAE Sosial)

Dari kelima Misi diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan termasuk dalam **Misi ke-IV**

yakni **"Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah Basis Produksi, Daerah Terluar, Daerah Terpencil, serta Perwilayahan Industri secara Merata (SAE Infrastruktur)"**.

".

Berdasarkan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahan 2025 – 2026 **tujuan keempat** : ***Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah*** dengan indikator tujuan adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dimana terdapat **sasasan strategis pertama** yaitu: ***Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur*** dengan Indikator Sasaran Strategis adalah *Indeks Infrastruktur Dasar, maka s*elaras dan dengan memperhatikan sasaran strategis RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, diturunkan ke dalam Tujuan Pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo dalam Renstra Dinas kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu "**Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Melalui Kualitas Permukiman Layak"**, dengan indikator tujuan Indeks Infrastruktur Dasar.

## 3.2 Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo

Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo menuju pencapaian tujuan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Tatakelola Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase Kenaikan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi, dengan indikator (1) Persentase peningkatan SR yang menggunakan air minum layak, (2) Persentase peningkatan SR yang menggunakan sanitasi layak.
3. Meningkatnya ketersediaan dan pengelolaan aset tanah/gedung bangunan publik, dengan indikator Persentase peningkatan bangunan pelayanan publik berkualitas baik.
4. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat, dengan indikator Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni.

## Tabel 3.1

## Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

## Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur | Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Melalui Kualitas Permukiman Layak | | Indeks Infrastruktur Dasar (Indeks) | 69,49 | 70,28 | 70,97 | 71,6 | 72,23 | 72,91 | 73,61 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tatakelola Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi (%) | Persentase peningkatan SR yang menggunakan air minum layak (%) | 0,69 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | | Persentase peningkatan SR yang menggunakan sanitasi layak (%) | 0,54 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| | | Meningkatnya ketersediaan dan pengelolaan aset | Persentase peningkatan bangunan | 5,25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tanah/gedung bangunan publik | pelayanan publik berkualitas baik (%) | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat | Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) | 92,58 | 95,11 | 95,26 | 95,44 | 95,63 | 95,85 | 96,09 | |

**Tabel 3.2**

**Formulasi Indikator Tujuan Dinas Tahun 2025-2029**

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(1)* | *(2)* | *(3* | *(4)* | *(5* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* |
| Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Melalui Kualitas Permukiman Layak | Indeks Infrastruktur Dasar | Indeks infrastruktur dasar adalah rata-rata persentase jalan dan jembatan mantab +Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan + Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) +Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni+Prosentase bangunan gedung dalam kondisi baik + Prosentase ketersedian sarana pendidikan +Prosentase ketersedian sarana kesehatan+Prosentase penanganan sampah + Prosentase kenaikan pengelolaan sumber daya air kondisi baik. | 69,49 | 70,28 | 70,97 | 71,6 | 72,23 | 72,91 | 73,61 |

## Tabel 3.3

## Formulasi Indikator Sasaran Dinas Tahun 2025-2029

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | FORMULASI PERHITUNGAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(1)* | *(2)* | *(3* | *(4)* | *(5* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* |
| Meningkatnya Akuntabilitas Tatakelola Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | Nilai LHE AKIP Tahun (n) – (n-1) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi (%) | Persentase peningkatan SR yang menggunakan air minum layak (%) | Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak th (n) - Persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, th (n-1) | 0,69 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Perpipaan th (n-1) / Total Rumah Tangga Perkotaan th (n-1) x 100%. | 17,29 | 23,44 | 28,06 | 32,68 | 37,30 | 41,92 | 45,00 |
| | Persentase peningkatan SR yang menggunakan sanitasi layak (%) | Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak th (n) - Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, th (n-1) | 0,54 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman th (n-1) dengan total jumlah rumah tangga th (n-1) x 100% | 0,96 | 2,7 | 4,44 | 6,18 | 7,92 | 9,66 | 11,4 |
| Meningkatnya ketersediaan dan pengelolaan aset tanah/gedung bangunan publik | Persentase peningkatan bangunan pelayanan publik berkualitas baik (%) | Prosentase bangunan pelayanan publik berkualitas baik th (n) - Prosentase bangunan pelayanan publik berkualitas baik th (n) | 5,25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat | Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) | Jumlah rumah tangga mendiami rumah layak huni th (n) / Jumlah rumah di Kabupaten Probolinggo th (n) X 100% | 92,58 | 95,11 | 95,26 | 95,44 | 95,63 | 95,85 | 96,09 |
| | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | Jumlah RT dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan th (n) – Total RT th (n) x 100% | 58,26 | 62 | 59,91 | 61,19 | 62,47 | 63,64 | 64,91 |

### 3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra.

Strategi yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dan sasaran antara lain

1. Peningkatan cakupan pelayanan air minum layak dan aman
2. Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi layak dan aman
3. Peningkatan cakupan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat
4. Peningkatan optimalisasi penanganan Kawasan kumuh permukiman
5. Peningkatan bangunan pelayanan publik berkualitas baik
6. Peningkatan identifikasi, inventarisasi serta penyelesaian yang terkait dengan pertanahan
7. Peningkatan nilai implementasi SAKIP sebagai gambaran peningkatan akuntabilitas kinerja dinas

### 3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan yang diambil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di wilayah Kabupaten Probolinggo.
2. Optimalisasi pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional melalui penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana persampahan berupa TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.
3. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Probolinggo.
4. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan.
5. Peningkatan penataan bangunan gedung dan lingkungannya supaya lebih berkualitas dan tertata.
6. Peningkatan kawasan kumuh permukiman yang ditangani dan mengoptimalkan cakupan hunian layak dalam rangka pencegahan peningkatan Kawasan kumuh di Kabupaten Probolinggo.
7. Peningkatan pengidentifikasian dan inventarisasi data pertanahan.
8. Optimalisasi sinkronisasi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi capaian kinerja.

**Tabel 3.4**
**Penahapan Renstra**
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
**Kabupaten Probolinggo**

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan pondasi layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan menuju Kabupaten Probolinggo yang berdaya saing<br><br>Penyediaan legalitas formal pendukung layanan insfrastruktur dasar, antara lain : Perda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman, Peraturan Bupati terkait RISPAM, Pengelolaan Air Limbah Domestik, dll.<br><br>Penyiapan SDM yang berkualitas melalui Pendidikan dan pelatihan | Percepatan penguatan pondasi layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan<br><br>Penambahan akses layanan infrastruktur dasar seperti peningkatan jumlah layanan SR air minum dan dan air limbah, peningkatan unit layanan rumah layak huni, fasilitas gedung layanan publik, dll.<br><br>Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi serta inovasi karyawan karyawati dalam peningkatan layanan infrastruktur dasar | Pemantapan pondasi layanan insfrastruktur dasar berkualitas<br><br>Penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan layanan infrastruktur dasar, seperti penguatan kelembagaan kelompok pengelola SPAM (HIPAM), KPP Air Limbah Domestik, dll<br><br>Penguatan SDM dilakukan dengan Pembinaan bagi kelompok-kelompok pengelola sarana infrastruktur dasar, tenaga fasilitator, pendamping masyarakat serta tenaga ahli | Pemantapan Infrastruktur / infrastruktur berkelanjutan<br><br>Memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, dll,<br><br>Memperbaiki dan memelihara infrastruktur dasar secara berkala seperti penambahan *idle capacity*, peninjauan ulang IPLT, dll | Perwujudan percepatan tata Kelola infrastruktur dasar dan berkelanjutan |

## Tabel 3.5

## Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Peningkatan kualitas dan pemerataan akses infrastruktur dasar melalui jalan dan jembatan, penyediaan rumah layak huni, air minum, sanitasi serta perbaikan dan penambahan saluran jaringan irigasi | Pemenuhan akses perumahan dan permukiman layak huni | - Peningkatan kawasan kumuh permukiman yang ditangani dan mengoptimalkan cakupan hunian layak dalam rangka pencegahan peningkatan Kawasan kumuh di Kabupaten Probolinggo<br>- Peningkatan penataan bangunan gedung dan lingkungannya supaya lebih berkualitas dan tertata<br>- Peningkatan pengidentifikasian dan inventarisasi data pertanahan<br>- Optimalisasi sinkronisasi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi capaian kinerja | - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota<br>- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota<br>- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha<br>- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota<br>- Penyelenggaraan PSU Perumaha<br>- Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil<br>- Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung<br>- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya<br>- Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah<br>- Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee<br>- Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten |
| | | Percepatan pemerataan dan peningkatan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi | - Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di wilayah Kabupaten Probolinggo<br>- Optimalisasi pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional melalui penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana persampahan berupa TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS<br>- Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Probolinggo<br>- Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan | - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten<br>- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten<br>- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Kabupaten<br>- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan |

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, dimana sesuai kewenangan tugas pokok dan fungsinya mengampu 2 (dua) Bidang Urusan wajib pelayanan dasar yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta 1 (satu) urusan wajib diluar pelayanan dasar yaitu Urusan Pertanahan.

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dinas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta yang terbaru mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## 4.1 Uraian Program

Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Dalam rencana strategis tahun 2025-2029, ada 16 program yang digunakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai bidang urusan kewenangan yang diamanatkan. Pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang program yang digunakan sejumlah 6 (enam) program, bidang urusan perumahan dan Kawasan permukiman sejumlah 6 (enam) program termasuk diantaranya program penunjang serta penggunaan 4 (empat) program pada bidang urusan pertanahan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun rencana program yang dimaksud antara lain:

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
5. Program Penataan Bangunan Gedung.

6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan.
7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
9. Program Redistribusi.
10. Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee.
11. Program Penatagunaan Tanah.
12. Program Pengembangan Perumahan.
13. Program Kawasan Permukiman.
14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).
15. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari 16 program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo diatas beberapa diantaranya merupakan bagian dari program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada janji politik Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029, dimana pelaksanaannya diharapkan mampu mencapai tujuan pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Program prioritas tersebut antara lain:

1. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

   Mengacu pada MISI 3 : SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

   Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau.

   Tujuan : Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesejahteraan

   Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan pemuda

   Outcome : Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata

   Aktivitas : Revitalisasi GOR

2. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

   Mengacu pada MISI 4 : SAE INFRASTRUKTUR

   Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata.

   Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah

   Sasaran : Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur

   Outcome : Meningkatnya kualitas bangunan gedung

   Aktivitas : Gugus Satgas Infrastruktur Pengawasan Pembangunan Infrastruktur

3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

   Mengacu pada MISI 5 : SAE SOSIAL

   Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas

Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas

Outcome : Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Aktivitas : 5.000 RUMAH LAYAK HUNI

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

## TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | 9.869.894.573,6 | | 9.979.800.000 | | 10.128.800.000 | | 10.335.800.000 | | 10.578.500.000 | |
| 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | 1.650.000.000 | | 1.668.400.000 | | 1.693.300.000 | | 1.727.900.000 | | 1.768.500.000 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan (%) | 64,71 | 64,76 | 64,81 | 1.650.000.000 | 64,86 | 1.668.400.000 | 64,91 | 1.693.300.000 | 64,96 | 1.727.900.000 | 65,01 | 1.768.500.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | | 219.894.573,6 | | 222.400.000 | | 225.800.000 | | 230.500.000 | | 236.000.000 | |
| Meningkatnya Layanan Persampahan | Persentase Sarana Persampahan yang Terbangun (%) | 100 | 100 | 100 | 219.894.573,6 | 100 | 222.400.000 | 100 | 225.800.000 | 100 | 230.500.000 | 100 | 236.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | 6.620.000.000 | | 6.693.600.000 | | 6.793.400.000 | | 6.932.000.000 | | 7.094.600.000 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%) | 63,72 | 63,73 | 63,75 | 6.620.000.000 | 63,76 | 6.693.600.000 | 63,77 | 6.793.400.000 | 63,79 | 6.932.000.000 | 63,8 | 7.094.600.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | 360.000.000 | | 364.000.000 | | 369.500.000 | | 377.100.000 | | 386.000.000 | |
| Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 360.000.000 | 97,9 | 364.000.000 | 97,9 | 369.500.000 | 97,9 | 377.100.000 | 97,9 | 386.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | 590.000.000 | | 596.600.000 | | 605.500.000 | | 617.900.000 | | 632.400.000 | |
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) | 68,42 | 71,42 | 72,42 | 590.000.000 | 73,42 | 596.600.000 | 74,42 | 605.500.000 | 75,42 | 617.900.000 | 76,42 | 632.400.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | 430.000.000 | | 434.800.000 | | 441.300.000 | | 450.400.000 | | 461.000.000 | |
| Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | 10 | 10 | 100 | 430.000.000 | 100 | 434.800.000 | 100 | 441.300.000 | 100 | 450.400.000 | 100 | 461.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 14.262.173.259 | | 14.420.900.000 | | 14.636.100.000 | | 14.935.000.000 | | 15.285.400.000 | |
| 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 7.782.173.259 | | 7.868.700.000 | | 7.986.000.000 | | 8.149.000.000 | | 8.340.100.000 | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah | Persentase tanah objek landreform yang siap didistribusikan (%) | 100 | 100 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | | 10.000.000 | | 10.200.000 | | 10.500.000 | | 10.900.000 | | 11.300.000 | |
| Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah | Persentase Aset Tanah Pemda yang bersertifikat (%) | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 10.000.000 | 27,13 | 10.200.000 | 27,13 | 10.500.000 | 27,13 | 10.900.000 | 27,13 | 11.300.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 24162067832.60 | | 24431200000.00 | | 24796000000.00 | | 25302800000.00 | | 25896800000.00 | |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Ukuran untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja adalah hasil *(output)* kegiatan. Pada rencana program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 terdapat 22 kegiatan pada 3 bidang urusan kewenangan. Bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki 6 kegiatan, bidang urusan perumahan dan Kawasan permukiman terdapat 18 kegiatan, dan bidang urusan pertanahan 4 kegiatan. Penjelasan atas output kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
   - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

     *Output* kegiatan Jumlah rumah tangga berakses air minum layak.

     Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses air minum layak apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari leding, air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata air terlindung) dengan jarak >= 10 m dari penampungan kotoran/limbah, dan air hujan / Rumah tangga yang mempunyai akses air minum perpipaan perkotaan dan pedesaan.
2. **Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**
   - Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

     *Output* kegiatan Jumlah rumah tangga berakses air minum layak Jumlah sarana persampahan terbangun/tersedia

Definisi Operasional dari indikator diatas adalah sarana prasarana persampahan berupa TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun pada tahun yang bersangkutan.

**3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

  *Output* kegiatan Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak.

  Definisi Operasional dari indikator diatas adalah rumah tangga yang memiliki jamban leher angsa, tempat penampungan limbah yang kedap/tangki septik kedap pada tahun yang bersangkutan.

**4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

  *Output* kegiatan Jumlah Panjang drainase permukiman yang dibangun/direhabilitasi.

  Definisi Operasional dari indikator diatas adalah drainase permukiman yang dibangun/direhabililtasi agar berfungsi dengan baik pada tahun yang bersangkutan.

**5. Program Penataan Bangunan Gedung**

- Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

*Output* kegiatan Jumlah sarana dan prasarana gedung pemerintahan yang dibangun/direhabilitasi.

Definisi Operasional dari indikator diatas adalah penyelenggaraan bangunan gedung negara yang dimiliki atau dikelola oleh negara untuk keperluan dinas, yang meliputi kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung negara.

**6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan**

- Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

  *Output* kegiatan Jumlah sarana dan prasarana fasilitas publik yang dibangun/direhabilitasi.

  Definisi Operasional indikator adalah unit fisik fasilitas umum yang telah selesai dibangun atau ditingkatkan kualitasnya dalam rangka mendukung fungsi pelayanan publik dan penataan lingkungan.

**7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

- Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

  *Output* kegiatan Jumlah Penyelesaian kasus sengketa tanah.

  Definisi Operasional kegiatan ini adalah penanganan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum atau konflik yang timbul akibat klaim kepemilikan, penguasaan, batas, hak, atau pemanfaatan atas sebidang tanah oleh dua pihak atau lebih, baik perorangan, kelompok, maupun lembaga.

**8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

- Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

  *Output* kegiatan Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

  Definisi Operasional kegiatan ini adalah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan proses pemberian ganti kerugian dan santunan atas tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**9. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee**

- Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

  *Output* kegiatan persentase subjek (petani penggarap) yang terdaftar dan telah memenuhi kriteria untuk menerima redistribusi / persentase kepemilikan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang berhasil diidentifikasi dan ditetapkan sebagai objek redistribusi / ersentase ganti rugi yang telah diselesaikan untuk tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dialokasikan untuk redistribusi.

  Definisi Operasional kegiatan ini adalah proses terukur dan dapat diobservasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan petani penerima manfaat (subjek) dan

tanah yang akan didistribusikan kembali (objek), baik tanah yang melebihi batas kepemilikan maksimal maupun tanah yang dimiliki pemilik absentee, serta menentukan kompensasi yang sesuai jika diperlukan, untuk mencapai pemerataan akses dan kepemilikan tanah yang lebih adil di wilayah tersebut.

**10. Program Penatagunaan Tanah**

- Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

  *Output* kegiatan Jumlah Penggunaan Tanah Pemda / sertifikasi PSU Perumahan

  Definisi Operasional kegiatan ini adalah mengukur jumlah tindakan legalisasi atau pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah (Pemda), termasuk di dalamnya proses sertifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang diserahkan oleh pengembang perumahan kepada Pemda.

**11. Program Pengembangan Perumahan**

- Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

  *Output* kegiatan Jumlah Dokumen Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota yang disusun

  Definisi Operasional kegiatan ini adalah dokumen berisi data rumah korban bencana dan relokasi program Kabupaten/Kota yang disusun.

- Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

  *Output* kegiatan Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dibangun & Direhabilitasi

  Definisi Operasional kegiatan ini adalah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi pada tahun yang bersangkutan.

**12. Program Kawasan Permukiman**

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

  *Output* Kegiatan Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Ditingkatkan Kualitasnya

  Definisi Operasional kegiatan ini adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui berbagai upaya perbaikan, seperti peningkatan infrastruktur (drainase, sanitasi, jalan), perbaikan kualitas bangunan, penyediaan air bersih, dan fasilitas umum lainnya, dalam persentase.

**13. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**

- Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

  *Output* Kegiatan Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Definisi Operasional kegiatan ini adalah perbaikan rumah yang tidak memenuhi syarat sebagai tempat tinggal yang layak, meliputi aspek konstruksi bangunan, kesehatan, dan keselamatan.

**14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**

- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

  *Output* Kegiatan Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

  Definisi Operasional kegiatan ini adalah tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah.

**15. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

- Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

  *Output* Kegiatan Jumlah fasilitasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil.

  Definisi Operasional kegiatan ini adalah kegiatan pelatihan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

**16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

  *Output* Kegiatan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu

  Definisi Operasional indikator kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

  *Output* Kegiatan Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu.

  Definisi Operasional indikator kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen pelaporan keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

  *Output* Kegiatan Persentase dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang diusulkan tepat waktu.

  Definisi Operasional indikator kegiatan ini adalah tersusunnya layanan dokumen administrasi kepegawaian yang diusulkan tepat waktu.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

  *Output* Kegiatan Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah.

Definisi Operasional indikator kegiatan ini adalah persentase atas layanan administrasi perkantoran yang telah terpenuhi dibanding target layanan administrasi perkantoran yang akan dipenuhi.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  *Output* Kegiatan Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah.
  Definisi Operasional indikator kegiatan ini adalah persentase atas jasa penunjang layanan perkantoran yang telah terpenuhi dibanding target jasa penunjang layanan perkantoran yang akan dipenuhi.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  *Output* Kegiatan Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara.
  Definisi Operasional indikator kegiatan ini adalah persentase atas barang milik daerah yang terpelihara dibanding target barang milik daerah yang akan terpelihara.

## 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

**Rincian rencana sub kegiatan dan pagu indikatof pendanaan pada kegiatan dan program pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2025-2029 kami sajikan sebagaimana tabel berikut:**

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 9.869.894.573,6 | | 9.979.800.000 | | 10.128.800.000 | | 10.335.800.000 | | 10.578.500.000 | | |
| 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | 1.650.000.000 | | 1.668.400.000 | | 1.693.300.000 | | 1.727.900.000 | | 1.768.500.000 | | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan (%) | 64,71 | 64,81 | 1.650.000.000 | 64,86 | 1.668.400.000 | 64,91 | 1.693.300.000 | 64,96 | 1.727.900.000 | 65,01 | 1.768.500.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.650.000.000 | | 1.668.400.000 | | 1.693.300.000 | | 1.727.900.000 | | 1.768.500.000 | | |
| Jumlah rumah tangga berakses air minum layak | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa) | 0 | 10 | 1.650.000.000 | 10 | 1.668.400.000 | 10 | 1.693.300.000 | 10 | 1.727.900.000 | 10 | 1.768.500.000 | | |
| | Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) | 0 | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | | |
| | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) | 177 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | 600.000.000 | | 618.295.000 | | 643.089.990 | | 666.013.142 | | 694.806.465 | | |
| Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) | 177 | 5 | 600.000.000 | 5 | 618.295.000 | 5 | 643.089.990 | 5 | 666.013.142 | 5 | 694.806.465 | | |
| 1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa | | | | 50.000.000 | | 50.005.000 | | 50.010.001 | | 50.566.041 | | 51.128.264 | | |
| Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa) | 0 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.005.000 | 10 | 50.010.001 | 10 | 50.566.041 | 10 | 51.128.264 | | |
| 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | 400.000.000 | | 400.040.000 | | 400.080.003 | | 404.528.327 | | 409.026.108 | | |
| Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) | 0 | 2 | 400.000.000 | 2 | 400.040.000 | 2 | 400.080.003 | 2 | 404.528.327 | 2 | 409.026.108 | | |
| 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | 200.000.000 | | 200.020.000 | | 200.040.002 | | 202.264.163 | | 204.513.054 | | |
| Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 0 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.020.000 | 2 | 200.040.002 | 2 | 202.264.163 | 2 | 204.513.054 | | |
| 1.03.03.2.01.0030 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | 400.000.000 | | 400.040.000 | | 400.080.004 | | 404.528.327 | | 409.026.109 | | |
| Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) | 0 | 60 | 400.000.000 | 60 | 400.040.000 | 60 | 400.080.004 | 60 | 404.528.327 | 60 | 409.026.109 | | |
| 1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | 219.894.573,6 | | 222.400.000 | | 225.800.000 | | 230.500.000 | | 236.000.000 | | |
| Meningkatnya Layanan Persampahan | Persentase Sarana Persampahan yang Terbangun (%) | 100 | 100 | 219.894.573,6 | 100 | 222.400.000 | 100 | 225.800.000 | 100 | 230.500.000 | 100 | 236.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 219.894.573,6 | | 222.400.000 | | 225.800.000 | | 230.500.000 | | 236.000.000 | | |
| Jumlah Sarana Persampahan Terbangun/Tersedia | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari) | 150 | 20 | 219.894.573,6 | 20 | 222.400.000 | 20 | 225.800.000 | 20 | 230.500.000 | 20 | 236.000.000 | | |
| | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari) | 0 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | 50.000.000 | | 50.005.000 | | 50.010.000 | | 50.015.001 | | 50.020.003 | | |
| Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari) | 0 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.005.000 | 10 | 50.010.000 | 10 | 50.015.001 | 10 | 50.020.003 | | |
| 1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | 50.000.000 | | 50.005.000 | | 50.010.001 | | 50.015.002 | | 50.020.003 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit) | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.005.000 | 1 | 50.010.001 | 1 | 50.015.002 | 1 | 50.020.003 | | |
| 1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | | | | 119.894.573,6 | | 122.390.000 | | 125.779.999 | | 130.469.997 | | 135.959.994 | | |
| Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari) | 150 | 20 | 119.894.573,6 | 20 | 122.390.000 | 20 | 125.779.999 | 20 | 130.469.997 | 20 | 135.959.994 | | |
| 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | 6.620.000.000 | | 6.693.600.000 | | 6.793.400.000 | | 6.932.000.000 | | 7.094.600.000 | | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%) | 63,72 | 63,75 | 6.620.000.000 | 63,76 | 6.693.600.000 | 63,77 | 6.793.400.000 | 63,79 | 6.932.000.000 | 63,8 | 7.094.600.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 6.620.000.000 | | 6.693.600.000 | | 6.793.400.000 | | 6.932.000.000 | | 7.094.600.000 | | |
| Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | 6.620.000.000 | 0 | 6.693.600.000 | 0 | 6.793.400.000 | 0 | 6.932.000.000 | 0 | 7.094.600.000 | | |
| | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit) | 2 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang ditingkatkan (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR)) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga) | 1.185 | 295 | | 295 | | 295 | | 295 | | 295 | | | |
| | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa) | 0 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| 1.03.05.2.01.0018 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0020 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0024 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0026 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0027 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0028 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | | 120.000.000 | | 120.012.000 | | 120.024.001 | | 121.358.498 | | 122.707.833 | | |
| Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit) | 2 | 4 | 120.000.000 | 4 | 120.012.000 | 4 | 120.024.001 | 4 | 121.358.498 | 4 | 122.707.833 | | |
| 1.03.05.2.01.0030 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang ditingkatkan (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0031 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0034 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa | | | | 50.000.000 | | 50.005.000 | | 50.010.001 | | 50.566.041 | | 51.128.264 | | |
| Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa) | 0 | 20 | 50.000.000 | 20 | 50.005.000 | 20 | 50.010.001 | 20 | 50.566.041 | 20 | 51.128.264 | | |
| 1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | 550.000.000 | | 550.055.000 | | 550.110.006 | | 556.226.449 | | 562.410.899 | | |
| Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 4 | 4 | 550.000.000 | 4 | 550.055.000 | 4 | 550.110.006 | 4 | 556.226.449 | 4 | 562.410.899 | | |
| 1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0042 - Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0043 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat | | | | 5.900.000.000 | | 5.973.528.000 | | 6.073.255.992 | | 6.203.849.012 | | 6.358.353.004 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Unit pengolahan setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga) | 1.185 | 295 | 5.900.000.000 | 295 | 5.973.528.000 | 295 | 6.073.255.992 | 295 | 6.203.849.012 | 295 | 6.358.353.004 | | |
| 1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | 360.000.000 | | 364.000.000 | | 369.500.000 | | 377.100.000 | | 386.000.000 | | |
| Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) | 97,9 | 97,9 | 360.000.000 | 97,9 | 364.000.000 | 97,9 | 369.500.000 | 97,9 | 377.100.000 | 97,9 | 386.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 360.000.000 | | 364.000.000 | | 369.500.000 | | 377.100.000 | | 386.000.000 | | |
| Jumlah Panjang drainase permukiman yang dibangun/direhabilitasi | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan) | 0 | 1 | 360.000.000 | 1 | 364.000.000 | 1 | 369.500.000 | 1 | 377.100.000 | 1 | 386.000.000 | | |
| | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M) | 597 | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | | |
| 1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M) | 597 | 150 | 300.000.000 | 150 | 300.000.000 | 150 | 300.000.000 | 150 | 300.000.000 | 150 | 300.000.000 | | |
| 1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | | | | 60.000.000 | | 64.000.000 | | 69.500.000 | | 77.100.000 | | 86.000.000 | | |
| Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan) | 0 | 1 | 60.000.000 | 1 | 64.000.000 | 1 | 69.500.000 | 1 | 77.100.000 | 1 | 86.000.000 | | |
| 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | 590.000.000 | | 596.600.000 | | 605.500.000 | | 617.900.000 | | 632.400.000 | | |
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) | 68,42 | 72,42 | 590.000.000 | 73,42 | 596.600.000 | 74,42 | 605.500.000 | 75,42 | 617.900.000 | 76,42 | 632.400.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | 590.000.000 | | 596.600.000 | | 605.500.000 | | 617.900.000 | | 632.400.000 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan yang Dibangun/Direhabilitasi | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen) | 2 | 1 | 590.000.000 | 1 | 596.600.000 | 1 | 605.500.000 | 1 | 617.900.000 | 1 | 632.400.000 | | |
| | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung) | 7 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis) | 5 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang) | 20 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | | |
| | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) | 500 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |
| Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung) | 7 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | | |
| 1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | 145.000.000 | | 151.600.000 | | 160.500.000 | | 172.900.000 | | 187.400.000 | | |
| Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung) | 0 | 1 | 145.000.000 | 1 | 151.600.000 | 1 | 160.500.000 | 1 | 172.900.000 | 1 | 187.400.000 | | |
| 1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen) | 2 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.03.08.2.01.0020 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis) | 5 | 3 | 25.000.000 | 3 | 25.000.000 | 3 | 25.000.000 | 3 | 25.000.000 | 3 | 25.000.000 | | |
| 1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | | |
| 1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya | Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang) | 20 | 30 | 25.000.000 | 30 | 25.000.000 | 30 | 25.000.000 | 30 | 25.000.000 | 30 | 25.000.000 | | |
| 1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) | 500 | 500 | 100.000.000 | 500 | 100.000.000 | 500 | 100.000.000 | 500 | 100.000.000 | 500 | 100.000.000 | | |
| 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | 430.000.000 | | 434.800.000 | | 441.300.000 | | 450.400.000 | | 461.000.000 | | |
| Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | 10 | 100 | 430.000.000 | 100 | 434.800.000 | 100 | 441.300.000 | 100 | 450.400.000 | 100 | 461.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 430.000.000 | | 434.800.000 | | 441.300.000 | | 450.400.000 | | 461.000.000 | | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Publik yang Dibangun/Direhabilitasi | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan) | 5 | 1 | 430.000.000 | 1 | 434.800.000 | 1 | 441.300.000 | 1 | 450.400.000 | 1 | 461.000.000 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang) | 0 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | 25.000.000 | | 29.800.000 | | 36.300.000 | | 45.400.000 | | 56.000.000 | | |
| Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 29.800.000 | 1 | 36.300.000 | 1 | 45.400.000 | 1 | 56.000.000 | | |
| 1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | |
| Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan) | 5 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | | |
| 1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang) | 0 | 10 | 5.000.000 | 10 | 5.000.000 | 10 | 5.000.000 | 10 | 5.000.000 | 10 | 5.000.000 | | |
| 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 14.262.173.259 | | 14.420.900.000 | | 14.636.100.000 | | 14.935.000.000 | | 15.285.400.000 | | |
| 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 7.782.173.259 | | 7.868.700.000 | | 7.986.000.000 | | 8.149.000.000 | | 8.340.100.000 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 79,26 | 79,36 | 7.782.173.259 | 79,41 | 7.868.700.000 | 79,46 | 7.986.000.000 | 79,51 | 8.149.000.000 | 79,56 | 8.340.100.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 66.006.600 | | 66.013.200 | | 66.019.803 | | 66.511.367 | | 67.008.374 | | |
| Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Tepat Waktu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 66.006.600 | 2 | 66.013.200 | 2 | 66.019.803 | 2 | 66.511.367 | 2 | 67.008.374 | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 22.002.200 | | 22.004.400 | | 22.006.601 | | 22.008.801 | | 22.011.002 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 2 | 22.002.200 | 2 | 22.004.400 | 2 | 22.006.601 | 2 | 22.008.801 | 2 | 22.011.002 | | |
| 1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 24.002.400 | | 24.004.800 | | 24.007.201 | | 24.274.127 | | 24.544.021 | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 24.002.400 | 2 | 24.004.800 | 2 | 24.007.201 | 2 | 24.274.127 | 2 | 24.544.021 | | |
| 1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 20.002.000 | | 20.004.000 | | 20.006.001 | | 20.228.439 | | 20.453.351 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | 4 | 20.002.000 | 4 | 20.004.000 | 4 | 20.006.001 | 4 | 20.228.439 | 4 | 20.453.351 | | |
| 1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 5.073.802.623 | | 5.074.310.002 | | 5.074.817.433 | | 5.131.242.213 | | 5.188.294.357 | | |
| Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 5.073.802.623 | 1 | 5.074.310.002 | 1 | 5.074.817.433 | 1 | 5.131.242.213 | 1 | 5.188.294.357 | | |
| | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 35 | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | | |
| 1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 5.042.299.473 | | 5.042.803.702 | | 5.043.307.983 | | 5.099.382.422 | | 5.156.080.330 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 35 | 36 | 5.042.299.473 | 36 | 5.042.803.702 | 36 | 5.043.307.983 | 36 | 5.099.382.422 | 36 | 5.156.080.330 | | |
| 1.04.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 15.001.500 | | 15.003.000 | | 15.004.500 | | 15.171.329 | | 15.340.013 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 15.001.500 | 12 | 15.003.000 | 12 | 15.004.500 | 12 | 15.171.329 | 12 | 15.340.013 | | |
| 1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 16.501.650 | | 16.503.300 | | 16.504.950 | | 16.688.462 | | 16.874.014 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 16.501.650 | 1 | 16.503.300 | 1 | 16.504.950 | 1 | 16.688.462 | 1 | 16.874.014 | | |
| 1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 298.229.820 | | 298.259.643 | | 298.289.468 | | 301.606.025 | | 304.959.457 | | |
| Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Diusulkan Tepat Waktu | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | 6 | 298.229.820 | 6 | 298.259.643 | 6 | 298.289.468 | 6 | 301.606.025 | 6 | 304.959.457 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 40 | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | | |
| 1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 115.011.500 | | 115.023.001 | | 115.034.503 | | 116.313.524 | | 117.606.766 | | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | 6 | 115.011.500 | 6 | 115.023.001 | 6 | 115.034.503 | 6 | 116.313.524 | 6 | 117.606.766 | | |
| 1.04.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 183.218.320 | | 183.236.642 | | 183.254.965 | | 185.292.501 | | 187.352.691 | | |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 40 | 40 | 183.218.320 | 40 | 183.236.642 | 40 | 183.254.965 | 40 | 185.292.501 | 40 | 187.352.691 | | |
| 1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 1.363.812.513 | | 1.363.948.894 | | 1.364.085.289 | | 1.379.251.986 | | 1.394.587.314 | | |
| Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 1.363.812.513 | 1 | 1.363.948.894 | 1 | 1.364.085.289 | 1 | 1.379.251.986 | 1 | 1.394.587.314 | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.431.529 | | 7.432.272 | | 7.433.015 | | 7.515.660 | | 7.599.224 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 7.431.529 | 1 | 7.432.272 | 1 | 7.433.015 | 1 | 7.515.660 | 1 | 7.599.224 | | |
| 1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 896.631.614 | | 896.721.277 | | 896.810.949 | | 906.782.217 | | 916.864.350 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 5 | 896.631.614 | 5 | 896.721.277 | 5 | 896.810.949 | 5 | 906.782.217 | 5 | 916.864.350 | | |
| 1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 184.287.958 | | 184.306.387 | | 184.324.817 | | 186.374.248 | | 188.446.466 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 184.287.958 | 1 | 184.306.387 | 1 | 184.324.817 | 1 | 186.374.248 | 1 | 188.446.466 | | |
| 1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 20.482.088 | | 20.484.136 | | 20.486.185 | | 20.713.962 | | 20.944.272 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 20.482.088 | 12 | 20.484.136 | 12 | 20.486.185 | 12 | 20.713.962 | 12 | 20.944.272 | | |
| 1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 254.979.324 | | 255.004.822 | | 255.030.323 | | 257.865.899 | | 260.733.002 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 254.979.324 | 12 | 255.004.822 | 12 | 255.030.323 | 12 | 257.865.899 | 12 | 260.733.002 | | |
| 1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 700.709.745 | | 786.528.339 | | 903.120.122 | | 987.611.015 | | 1.099.329.021 | | |
| Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 700.709.745 | 12 | 786.528.339 | 12 | 903.120.122 | 12 | 987.611.015 | 12 | 1.099.329.021 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 117.517.202 | | 117.528.954 | | 117.540.707 | | 118.847.593 | | 120.169.010 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 117.517.202 | 12 | 117.528.954 | 12 | 117.540.707 | 12 | 118.847.593 | 12 | 120.169.010 | | |
| 1.04.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 120.158.895 | | 120.170.911 | | 120.182.928 | | 121.519.192 | | 122.870.313 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 120.158.895 | 12 | 120.170.911 | 12 | 120.182.928 | 12 | 121.519.192 | 12 | 122.870.313 | | |
| 1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 463.033.648 | | 548.828.474 | | 665.396.487 | | 747.244.230 | | 856.289.698 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 463.033.648 | 12 | 548.828.474 | 12 | 665.396.487 | 12 | 747.244.230 | 12 | 856.289.698 | | |
| 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 279.611.958 | | 279.639.922 | | 279.667.885 | | 282.777.394 | | 285.921.477 | | |
| Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 10 | 279.611.958 | 10 | 279.639.922 | 10 | 279.667.885 | 10 | 282.777.394 | 10 | 285.921.477 | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 25 | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | | |
| | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 15 | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | | |
| 1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 132.713.270 | | 132.726.541 | | 132.739.814 | | 134.215.693 | | 135.707.981 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 25 | 14 | 132.713.270 | 14 | 132.726.541 | 14 | 132.739.814 | 14 | 134.215.693 | 14 | 135.707.981 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 142.898.288 | | 142.912.578 | | 142.926.869 | | 144.516.014 | | 146.122.827 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 15 | 16 | 142.898.288 | 16 | 142.912.578 | 16 | 142.926.869 | 16 | 144.516.014 | 16 | 146.122.827 | | |
| 1.04.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 1.000.100 | | 1.000.200 | | 1.000.300 | | 1.011.422 | | 1.022.668 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 10 | 1.000.100 | 10 | 1.000.200 | 10 | 1.000.300 | 10 | 1.011.422 | 10 | 1.022.668 | | |
| 1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.000.100 | | 1.000.200 | | 1.000.300 | | 1.011.422 | | 1.022.668 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | 3 | 1.000.100 | 3 | 1.000.200 | 3 | 1.000.300 | 3 | 1.011.422 | 3 | 1.022.668 | | |
| 1.04.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 1.000.100 | | 1.000.200 | | 1.000.300 | | 1.011.422 | | 1.022.668 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | 1.000.100 | 1 | 1.000.200 | 1 | 1.000.300 | 1 | 1.011.422 | 1 | 1.022.668 | | |
| 1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1.000.100 | | 1.000.203 | | 1.000.302 | | 1.011.421 | | 1.022.665 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | 1 | 1.000.100 | 1 | 1.000.203 | 1 | 1.000.302 | 1 | 1.011.421 | 1 | 1.022.665 | | |
| 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | 400.000.000 | | 404.500.000 | | 410.600.000 | | 419.000.000 | | 428.900.000 | | |
| Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Persentase Rumah Korban Bencana / Relokasi Program yang Dibangun dan Direhabilitasi (%) | 100 | 100 | 400.000.000 | 100 | 404.500.000 | 100 | 410.600.000 | 100 | 419.000.000 | 100 | 428.900.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| Jumlah Dokumen Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Disusun | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | | |
| 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | 300.000.000 | | 304.500.000 | | 310.600.000 | | 319.000.000 | | 328.900.000 | | |
| Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dibangun dan Direhabilitasi | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) | 4 | 6 | 300.000.000 | 6 | 304.500.000 | 6 | 310.600.000 | 6 | 319.000.000 | 6 | 328.900.000 | | |
| 1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | 300.000.000 | | 304.500.000 | | 310.600.000 | | 319.000.000 | | 328.900.000 | | |
| Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) | 4 | 6 | 300.000.000 | 6 | 304.500.000 | 6 | 310.600.000 | 6 | 319.000.000 | 6 | 328.900.000 | | |
| 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 150.000.000 | | 151.700.000 | | 154.000.000 | | 157.200.000 | | 160.900.000 | | |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase areal kawasan kumuh (Ha) tertangani (%) | 1,98 | 1,98 | 150.000.000 | 1,98 | 151.700.000 | 1,98 | 154.000.000 | 1,98 | 157.200.000 | 1,98 | 160.900.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | 150.000.000 | | 151.700.000 | | 154.000.000 | | 157.200.000 | | 160.900.000 | | |
| Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Ditingkatkan Kualitasnya | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 16 | 2 | 150.000.000 | 2 | 151.700.000 | 2 | 154.000.000 | 2 | 157.200.000 | 2 | 160.900.000 | | |
| | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) | 0,5 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | | |
| | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) | 0,5 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 16 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | | |
| 1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | | |
| 1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | 42.500.000 | | 42.500.000 | | 42.500.000 | | 42.500.000 | | 42.500.000 | | |
| Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) | 0,5 | 0,1 | 42.500.000 | 0,1 | 42.500.000 | 0,1 | 42.500.000 | 0,1 | 42.500.000 | 0,1 | 42.500.000 | | |
| 1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | | | | 42.500.000 | | 44.200.000 | | 46.500.000 | | 49.700.000 | | 53.400.000 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) | 0,5 | 0,1 | 42.500.000 | 0,1 | 44.200.000 | 0,1 | 46.500.000 | 0,1 | 49.700.000 | 0,1 | 53.400.000 | | |
| 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | 5.750.000.000 | | 5.813.900.000 | | 5.900.600.000 | | 6.021.000.000 | | 6.162.200.000 | | |
| Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman | Persentase penurunan angka RTLH masyarakat miskin secara swadaya (%) | 0,51 | 1,87 | 5.750.000.000 | 2,16 | 5.813.900.000 | 2,5 | 5.900.600.000 | 2,89 | 6.021.000.000 | 3,34 | 6.162.200.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5.750.000.000 | | 5.813.900.000 | | 5.900.600.000 | | 6.021.000.000 | | 6.162.200.000 | | |
| Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) | 0 | 10 | 5.750.000.000 | 10 | 5.813.900.000 | 10 | 5.900.600.000 | 10 | 6.021.000.000 | 10 | 6.162.200.000 | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang) | 0 | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | | |
| | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 358 | 252 | | 252 | | 252 | | 252 | | 252 | | | |
| 1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | 5.500.000.000 | | 5.563.900.000 | | 5.650.600.000 | | 5.771.000.000 | | 5.912.200.000 | | |
| Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 358 | 252 | 5.500.000.000 | 252 | 5.563.900.000 | 252 | 5.650.600.000 | 252 | 5.771.000.000 | 252 | 5.912.200.000 | | |
| 1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) | 0 | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | | |
| 1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang) | 0 | 250 | 50.000.000 | 250 | 50.000.000 | 250 | 50.000.000 | 250 | 50.000.000 | 250 | 50.000.000 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | 170.000.000 | | 171.900.000 | | 174.500.000 | | 178.100.000 | | 182.300.000 | | |
| Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (Nilai) | 71 | 73,5 | 170.000.000 | 74 | 171.900.000 | 74,5 | 174.500.000 | 75 | 178.100.000 | 75,5 | 182.300.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | 170.000.000 | | 171.900.000 | | 174.500.000 | | 178.100.000 | | 182.300.000 | | |
| Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) | 1 | 1 | 170.000.000 | 1 | 171.900.000 | 1 | 174.500.000 | 1 | 178.100.000 | 1 | 182.300.000 | | |
| | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | | |
| 1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | | |
| 1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | 100.000.000 | | 101.900.000 | | 104.500.000 | | 108.100.000 | | 112.300.000 | | |
| Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 101.900.000 | 1 | 104.500.000 | 1 | 108.100.000 | 1 | 112.300.000 | | |
| 1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 10.000.000 | | 10.200.000 | | 10.400.000 | | 10.700.000 | | 11.000.000 | | |
| Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah | Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana | 87 | 87 | 10.000.000 | 87 | 10.200.000 | 87 | 10.400.000 | 87 | 10.700.000 | 87 | 11.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | | | | 10.000.000 | | 10.200.000 | | 10.400.000 | | 10.700.000 | | 11.000.000 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Jumlah fasilitasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan) | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.200.000 | 1 | 10.400.000 | 1 | 10.700.000 | 1 | 11.000.000 | | |
| 1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | | | | 10.000.000 | | 10.200.000 | | 10.400.000 | | 10.700.000 | | 11.000.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan) | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.200.000 | 1 | 10.400.000 | 1 | 10.700.000 | 1 | 11.000.000 | | |
| 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | 30.000.000 | | 30.500.000 | | 31.100.000 | | 32.000.000 | | 32.900.000 | | |
| 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | 10.000.000 | | 10.200.000 | | 10.400.000 | | 10.700.000 | | 11.000.000 | | |
| Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan | Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi (%) | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.200.000 | 100 | 10.400.000 | 100 | 10.700.000 | 100 | 11.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 10.000.000 | | 10.200.000 | | 10.400.000 | | 10.700.000 | | 11.000.000 | | |
| Jumlah Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.200.000 | 1 | 10.400.000 | 1 | 10.700.000 | 1 | 11.000.000 | | |
| | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5.000.000 | | 5.200.000 | | 5.400.000 | | 5.700.000 | | 6.000.000 | | |
| Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.200.000 | 1 | 5.400.000 | 1 | 5.700.000 | 1 | 6.000.000 | | |
| 2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | | |
| 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | | | | 5.000.000 | | 5.100.000 | | 5.200.000 | | 5.400.000 | | 5.600.000 | | |
| Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase) | 100 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.100.000 | 100 | 5.200.000 | 100 | 5.400.000 | 100 | 5.600.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5.000.000 | | 5.100.000 | | 5.200.000 | | 5.400.000 | | 5.600.000 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.100.000 | 1 | 5.200.000 | 1 | 5.400.000 | 1 | 5.600.000 | | |
| 2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5.000.000 | | 5.100.000 | | 5.200.000 | | 5.400.000 | | 5.600.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.100.000 | 1 | 5.200.000 | 1 | 5.400.000 | 1 | 5.600.000 | | |
| 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah | Persentase tanah objek landreform yang siap didistribusikan (%) | 100 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta penetapan ganti kerugian atas tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang sah dan mengikat secara hukum | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | | |
| | Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | | |
| 2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria | Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara) | 0 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | | |
| 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | 10.000.000 | | 10.200.000 | | 10.500.000 | | 10.900.000 | | 11.300.000 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.100.000 | 1 | 5.200.000 | 1 | 5.400.000 | 1 | 5.600.000 | | |
| 2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5.000.000 | | 5.100.000 | | 5.200.000 | | 5.400.000 | | 5.600.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.100.000 | 1 | 5.200.000 | 1 | 5.400.000 | 1 | 5.600.000 | | |
| 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah | Persentase tanah objek landreform yang siap didistribusikan (%) | 100 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta penetapan ganti kerugian atas tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang sah dan mengikat secara hukum | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | | |
| | Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | | |
| 2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria | Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara) | 0 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | | |
| 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | 10.000.000 | | 10.200.000 | | 10.500.000 | | 10.900.000 | | 11.300.000 | | |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah | Persentase Aset Tanah Pemda yang bersertifikat (%) | 27,13 | 27,13 | 10.000.000 | 27,13 | 10.200.000 | 27,13 | 10.500.000 | 27,13 | 10.900.000 | 27,13 | 11.300.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | | | | 10.000.000 | | 10.200.000 | | 10.500.000 | | 10.900.000 | | 11.300.000 | | |
| Jumlah Penggunaan Tanah Pemda/Sertifikasi PSU Perumahan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 3 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.200.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.900.000 | 1 | 11.300.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 3 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | | |
| 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | | | | 5.000.000 | | 5.200.000 | | 5.500.000 | | 5.900.000 | | 6.300.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.200.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.900.000 | 1 | 6.300.000 | | |

## 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Keseluruhan sub kegiatan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mendukung RPJMD tahun 2025-2029 berperan dan saling mendukung pencapaian tujuan dan sasaran keseluruhan organisasi. Namun dalam hal adanya program prioritas Kepala Daerah SAE Infrastruktur, SAE Pendidikan dan Kesehatan serta SAE Sosial, ada beberapa sub kegiatan yang mendukung, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** | | | | |
| 1, | 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | 1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | MISI 4 : SAE INFRASTRUKTUR |
| | | | 1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | |
| 2, | 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | 1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | MISI 3 : SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN |
| | | | 1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | |
| 3, | 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman | 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | MISI 5 : SAE SOSIAL |
| | | | 1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | |

## 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah

Indikator sasaran rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2025-2029 dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pencapaian sasaran organisasi sebagai berikut:

**Tabel 4.4**
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo**

| NO | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(1)* | *(2)* | *(3* | *(4)* | *(5* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| 1 | Persentase Kenaikan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 2 | Persentase peningkatan SR yang menggunakan air minum layak | % | 0,69 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 3 | Persentase peningkatan SR yang menggunakan sanitasi layak | % | 0,54 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| 4 | Persentase peningkatan bangunan pelayanan publik berkualitas baik | % | 5,25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni | % | 92,58 | 95,11 | 95,26 | 95,44 | 95,63 | 95,85 | 96,09 | |

### 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Daerah melalui IKK (Indikator Kinerja Kunci)

Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja urusan pemerintahan digunakan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan dan pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo melaksanakan / mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintahan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Palayanan Dasar yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pelayanan Dasar Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pertanahan. Uraian IKK dan rencana target IKK dimaksud tahun 2025-2029 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Palayanan Dasar yaitu

   a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bobot Urusan: 7%)

**Tabel 4.5**
**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**
**Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
**Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo**

| NO | IKK | RUMUS | | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota | Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N / Jumlah total penduduk kabupaten/kota | x 100% | % | 64,71 | 64,76 | 64,81 | 64,86 | 64,91 | 64,96 | 65,01 |

| NO | IKK | RUMUS | | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional pada tahun N + Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional + jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N<br>———————————<br>Jumlah penduduk di kabupaten/kota | x 100% | % | 0,0021 | 0,0021 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |

| NO | IKK | RUMUS | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3 | Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota | Permohonan PBG & SLF yang diproses terhadap permohonan PBG & SLF yang masuk / Peningkatan jumlah permohonan PBG & SLF per tahun Kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap PBG & SLF yang telah diterbitkan x 100% | % | 605 (PBG Terbit di Tahun 2024) / 2208 (PBG Terbit dari Tahun 2022 sampai 2024) * 100 % = 27,4 % | 27,9 % | 28,4% | 28,9% | 29,4% | 29,9% | 30,4% |

b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Bobot Urusan: 7%)

**Tabel 4.6**
**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**
**Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
**Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo**

| NO | IKK | RUMUS | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | $\frac{\text{Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | $\frac{\text{Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

# RENSTRA 2025-2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

| NO | IKK | RUMUS | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3 | persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | $\frac{\text{Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)}}{\text{target luas kawasan kumuh dibawah10 Ha pada tahun N}} \times 100\%$ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani | $\frac{\text{jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun-N}}{\text{jumlah RTLH pada Tahun-N}} \times 100\%$ | % | 2,01% | 2,07% | 1,89% | 1,93% | 1,97% | 2,01% | 2,05% |
| 5 | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) | $\frac{\text{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}}{\text{Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}} \times 100\%$ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Palayanan Dasar

a. Pertanahan (Bobot Urusan: 2%)

**Tabel 4.7**
**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**
**Bidang Urusan Pertanahan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
**Kabupaten Probolinggo**

| NO | IKK | RUMUS | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran | $\frac{\text{Luas realisasi dari target luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee}}{\text{Realisasi dari target jumlah subjek yang ditetapkan}}$ x 100% | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti | $\frac{\text{luas realisasi dari target luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}}{\text{Target jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan}}$ x 100% | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| NO | IKK | RUMUS | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran | akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat | | | | | | | | |
| 3 | Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran | Luas realisasi tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah. / target luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah x 100% | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi | realisasi jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah / target jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai x 100% | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| NO | IKK | RUMUS | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | tanah dalam tahun anggaran | subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah | | | | | | | | |
| 5 | Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi | Jumlah kasus tanah garapan belum bersertipikat yang ditangani / Jumlah pengaduan kasus tanah garapan belum bersertipikat x 100% | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas | Jumlah desa atau kelurahan lengkap berkualitas / jumlah desa atau kelurahan dalam satu kabupaten atau kota x 100% | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah | Luas Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah / Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah x 100% | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan | Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota x100% | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| NO | IKK | RUMUS | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota | Luas Lokasi Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 9 | Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB | Luas Peta Nilai Tanah yang telah dikerjasamakan untuk dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB / Luas Peta Nilai Tanah pada wilayah Kabupaten/Kota x100% | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen yang menggambarkan cita-cita, harapan, kebijakan yang dituangkan dalam program perangkat daerah, termasuk kebijakan yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta indikasi pendanaan program kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama lima tahun kedepan. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo adalah menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan, menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Renstra ini diharapkan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, dimana pelaksanaannya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik serta menghasilkan laporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Probolinggo serta menjadi acuan kerangka penyusunan rencana kinerja (RENJA) setiap tahunnya.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo adalah proses untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan, mengidentifikasi masalah dan solusi, serta mengukur pencapaian target, guna memastikan tujuan pembangunan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan berjalan efektif dan efisien. Proses ini melibatkan koordinasi dengan berbagai bidang terkait dalam penyusunan laporan hasil evaluasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan Renstra selanjutnya.

Mekanisme pengendalian melibatkan internal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo untuk memantau progres dengan evaluasi dilakukan secara berkala menggunakan indikator kinerja. Laporan Kinerja disampaikan kepada Bupati Probolinggo melalui Sekretaris Daerah sesuai rencana, mekanisme

pengendalian dan evaluasi meliputi : a) Jadwal evaluasi periodik, setiap triwulan atau tahunan indikator tujuan; b) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian target sasaran.

Demikian kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan perencanaan pembangunan perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Probolinggo, 29 September 2025

KEPALA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**Dr. ROBY SISWANTO, ST, MT.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19730430 199901 1 001

RANCANGAN AKHIR

# RENCANA STRATEGIS

# RENSTRA 2025-2029

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

# RENCANA STRATEGIS
# TAHUN 2025-2029

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2025

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan dengan baik dan optimal.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 tahunan dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan pada periode transisi agar program dan kegiatan tetap berjalan berkelanjutan. Renstra mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Bapelitbangda dan pemangku kepentingan terkait.

Kami menyadari bahwa Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo ini masih jauh dari sempurna baik materi maupun penyajiannya, untuk itu diharapkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun untuk bahan perbaikan selanjutnya dan semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat dan gambaran bagi semua pihak yang menggunakannya.

Probolinggo, September 2025
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

**R. OEMAR SJARIEF, S.T., M.T.**
Pembina Tingkat I
NIP. 19720719 200312 1 003

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**DAFTAR ISI** ..... **ii**
**DAFTAR TABEL** ..... **iii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **iv**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 8
1.4 Sistematika Penulisan ..... 9

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** ..... **11**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ..... 36
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ..... 37
2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah ..... 39

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... **42**
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... 42
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan ..... 44

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** **46**
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan ..... 46
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ..... 56
4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 67

**BAB V PENUTUP** ..... **70**
5.1 Kaidah pelaksanaan ..... 70
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 71

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Jumlah Pegawai BPBD ..... | 22 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Asset yang dimiliki BPBD ..... | 24 |
| Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... | 28 |
| Tabel 2.4 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) ..... | 33 |
| Tabel 2.5 | Capaian SPM Trantibumlinmas Kategori Indeks Kebencanaan ..... | 34 |
| Tabel 2.6 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah ..... | 35 |
| Tabel 2.7 | Teknik Menyimpulkan lsu Strategis ..... | 40 |
| Tabel 3.1 | Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra | 43 |
| Tabel 3.2 | Formulasi Indikator Tujuan ..... | 43 |
| Tabel 3.3 | Formulasi Indikator Sasaran ..... | 44 |
| Tabel 3.4 | Penahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ..... | 45 |
| Tabel 3.5 | Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra ..... | 45 |
| Tabel 4.1 | Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra ..... | 47 |
| Tabel 4.2 | Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan ..... | 57 |
| Tabel 4.3 | Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... | 67 |
| Tabel 4.4 | lndikator Kinerja Utama BPBD ..... | 68 |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Kunci BPBD ..... | 69 |

# DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Struktur Organisasi BPBD ..... 21

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025 2029 dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris) dan Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi) yang telah di lantik pada tanggal 20 Februari 2025, menuangkan visi, misi, dan komitmen politik dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2025 hingga 2029.

Dalam Penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang secara teknis dijabarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini menjelaskan bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional, sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dan tahap selanjutnya adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjabarkan secara lebih operasional visi, misi, dan program kerja yang tercantum dalam RPJMD ke dalam target dan kegiatan yang lebih spesifik. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.
41. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Probolinggo;
42. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kemudahan Akses Dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Probolinggo;
43. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2025-2029;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan;
2. Memberikan gambaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini menyajikan data-data dan memuat informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

**BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

**BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

5.1 Kaidah pelaksanaan

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Sesuai Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan dalam BAB XXIX pasal 412 pada ayat (1) bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas:

a. Menyusun pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
b. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun prosedur tetap penanganan bencana;
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Kepala Pelaksana BPBD;
c. Unsur Pengarah, terdiri dari:
    1. Instansi;
    2. Profesional/Ahli.
d. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
i. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Kelompok Jabatan Fungsional;
k. UPT.

Kepala Badan membawahi Kepala Pelaksana BPBD dan Unsur Pengarah. Unsur Pengarah adalah unsur yang terdiri dari Instansi dan Tenaga Profesional/Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Pelaksana BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksana tugas jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud bertanggung-jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

### 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyusun kebijakan, mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana;
b. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
c. Perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan pengoordinasian dan pembinaan terhadap segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam rangka penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

### 2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana BPBD

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi, perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
b. Pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
d. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.Satuan Tugas sebagaimana dimaksud bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

### 2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
e. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

### 2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
b. Pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
c. Penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
d. Penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
e. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
f. Penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
g. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/ anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/ anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pra bencana serta pengurangan resiko bencana. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

### 2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

c. Pelaksanaan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. Pelaksanaan kerjasama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulagan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

### 2.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengoordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstrusi penanggulangan bencana pada pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

### 2.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai

dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator.
d. Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
e. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
f. Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas.
g. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan keahlian.
h. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
i. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

j. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

k. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.11 Tugas Pokok dan Fungsi UPT

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) huruf i, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI**
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

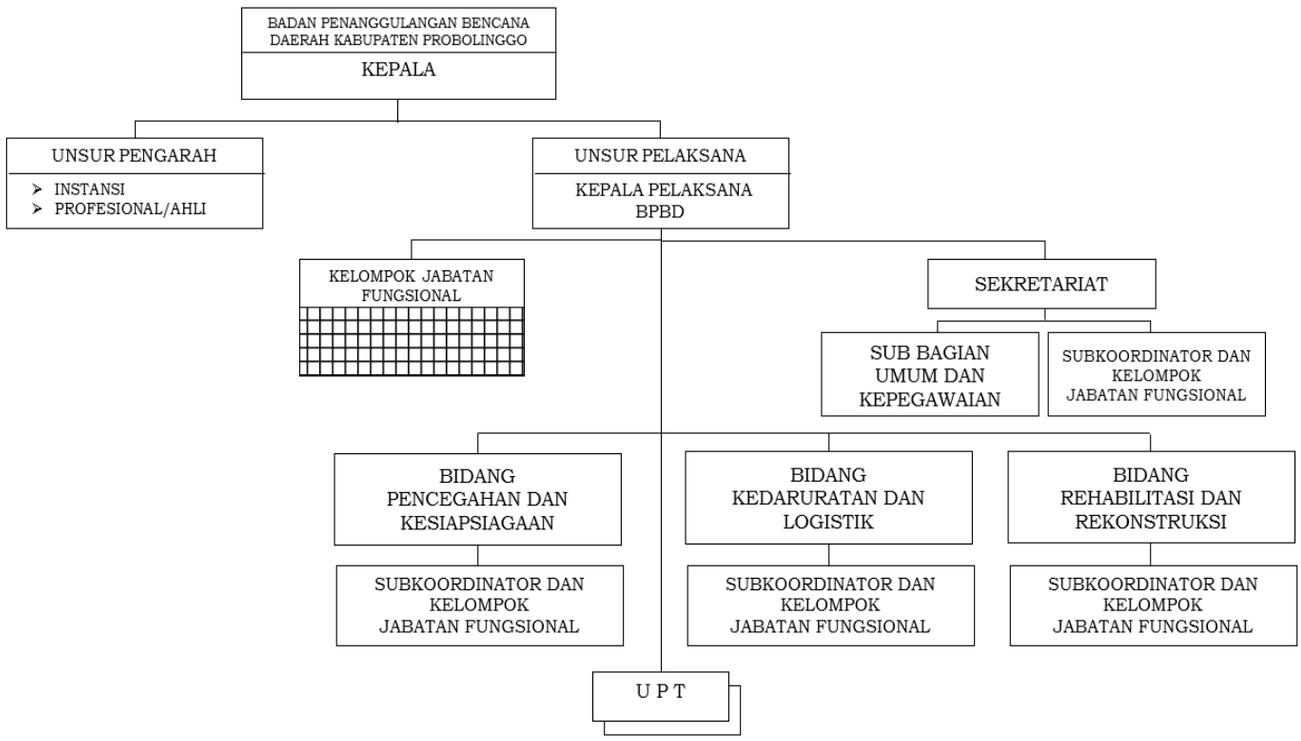

## 2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan struktur organisasi terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pejabat Fungsional, Staf PNS, Pegawai Tidak Tetap, Pusdalops dan TRC. Adapun Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebanyak 60 orang, terdiri dari:

**Tabel. 2.1**
**Jumlah Pegawai BPBD**

| No. | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **1.** | **Berdasarkan Jenis Kelamin :**<br>- Laki-laki<br>- Perempuan | <br>49<br>11 |
| **2.** | **Berdasarkan Status Kepegawaian :**<br>- PNS<br>- PPPK<br>- Pegawai Alih Daya | <br>14<br>2<br>44 |

| No. | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **3.** | **Berdasarkan Jenjang Pendidikan :** | |
| | - S2 | 8 |
| | - S1 | 24 |
| | - D3/DIV | 1 |
| | - SMA/SMK | 25 |
| | - SMP | 2 |
| | - SD | 0 |
| **4.** | **Berdasarkan Jenjang Eselon :** | |
| | - Eselon II | 1 |
| | - Eselon III.b | 3 |
| | - Eselon IV/Pejabat Fungsional | 4 |
| | - Staf PNS/Non Eselon | 8 |
| **5.** | **Berdasarkan Pangkat/Golongan :** | |
| | - Pembina Tingkat I | 1 |
| | - Pembina | 2 |
| | - Penata Tingkat I | 6 |
| | - Penata | 2 |
| | - Penata Muda | 2 |
| | - Pengatur Tingkat I | 1 |
| | - Golongan IX | 1 |
| | - Golongan VII | 1 |

*Sumber Data : Data Kepegawaian pada BPBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025*

### 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 27 Kota Probolinggo memiliki 3 (tiga) bangunan utama dan 1 (satu) mushola dengan total luas bangunan 90% dari luas tanah yang ada. Sementara itu, untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**
**Jumlah Asset yang dimiliki BPBD**

| No | Nama Barang | Jumlah Aset yang dimiliki (unit) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | A.C. Split | 3 |
| 2 | A.C. Window | 21 |
| 3 | Alat Kantor Lainnya | 2 |
| 4 | Alat Keamanan Lainnya (dst) | 83 |
| 5 | Alat Khusus Meteorologi | 4 |
| 6 | Alat Khusus SAR ( Search And Resque ) | 38 |
| 7 | Alat Komunikasi Radio ssb Lainnya (dst) | 1 |
| 8 | Alat Komunikasi Radio UHF Lainnya (dst) | 3 |
| 9 | Alat Laboratorium Lain-lainnya (dst) | 32 |
| 10 | Alat Pelindung Lainnya (dst) | 47 |
| 11 | Alat Pemadam Kebakaran Lainnya | 81 |
| 12 | Alat Pembantu Kebakaran | 37 |
| 13 | Alat Pemadam/Portable | 14 |
| 14 | Alat Pengangkat Lainnya (dst) | 1 |
| 15 | Alat Penghancur Kertas | 1 |
| 16 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 13 |
| 17 | Alat SAR lainnya | 10 |
| 18 | Alat Ukur Universal Lainnya (dst) | 1 |
| 19 | Bak Truk Logistik | 1 |
| 20 | Bangku Tunggu | 4 |
| 21 | Battery Charger (Peralatan Studio Audio) | 1 |
| 22 | Brandkas | 1 |
| 23 | Buffet Kaca | 2 |
| 24 | Camera Electronic | 3 |
| 25 | CCTV - Camera Control Television System | 1 |
| 26 | Dayung | 10 |
| 27 | Display | 1 |
| 28 | External/Portable Hardisk | 10 |
| 29 | Facsimile | 2 |
| 30 | Filing Cabinet Besi | 15 |
| 31 | Filing Cabinet Kayu | 5 |
| 32 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 1 |
| 33 | Garu | 10 |
| 34 | Genset | 20 |
| 35 | Gergaji Chain Saw | 3 |
| 36 | Global Positioning System | 7 |

| No | Nama Barang | Jumlah Aset yang dimiliki (unit) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 37 | Globe | 1 |
| 38 | Gordyin/Kray | 21 |
| 39 | Handy Talky (HT) | 28 |
| 40 | Helmet | 15 |
| 41 | Katrol | 1 |
| 42 | Kendaraan Dinas | 28 |
| 43 | Kipas Angin | 6 |
| 44 | Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah | 1 |
| 45 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 2 |
| 46 | Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut | 14 |
| 47 | Kunci Pas | 14 |
| 48 | Kunci Pipa | 7 |
| 49 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 |
| 50 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 4 |
| 51 | Kursi Kerja Pejabat lainnya | 42 |
| 52 | Kursi Lipat | 25 |
| 53 | Kursi Putar | 23 |
| 54 | Kursi Rapat | 41 |
| 55 | Kursi Tamu | 1 |
| 56 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II | 2 |
| 57 | Lampu | 3 |
| 58 | Laptop | 24 |
| 59 | Layar Film/Projector | 2 |
| 60 | Lemari Besi/Metal | 6 |
| 61 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 3 |
| 62 | Lemari Es | 1 |
| 63 | Lemari Kaca | 5 |
| 64 | Lemari Kayu | 15 |
| 65 | Lemari Sorok | 4 |
| 66 | Lensa Kamera | 1 |
| 67 | Life Jacket | 10 |
| 68 | Locker | 1 |
| 69 | Loudspeaker | 1 |
| 70 | Masker Debu | 15 |
| 71 | Meja 1/2 Biro | 6 |
| 72 | Meja Kerja Besi/Metal | 28 |
| 73 | Meja Kerja Kayu | 32 |
| 74 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 3 |

| No | Nama Barang | Jumlah Aset yang dimiliki (unit) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 75 | Meja Operator | 6 |
| 76 | Meja Panjang | 2 |
| 77 | Meja Rapat | 7 |
| 78 | Meja Rapat Pejabat Eselon II | 3 |
| 79 | Mesin Absensi | 2 |
| 80 | Mesin Bor Tanah | 1 |
| 81 | Mesin Gergaji | 12 |
| 82 | Mesin Kompresor | 1 |
| 83 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 2 |
| 84 | Microphone | 2 |
| 85 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 1 |
| 86 | Mobil Tangki Air | 6 |
| 87 | P.C Unit | 18 |
| 88 | Pager | 2 |
| 89 | Pakaian Panas/Lengkap | 10 |
| 90 | Perahu Karet | 4 |
| 91 | Peralatan Antena UHF Lainnya (dst) | 3 |
| 92 | Peralatan Jaringan lainnya | 2 |
| 93 | Peralatan Olahraga lainnya (dst) | 1 |
| 94 | Peralatan Personal Komputer lainnya | 32 |
| 95 | Perkakas Bengkel Service Lainnya (dst) | 9 |
| 96 | Perkakas Pengangkat Bermesin Lainnya (dst) | 1 |
| 97 | Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya (dst) | 25 |
| 98 | Pesawat Telephone | 1 |
| 99 | Pick Up | 3 |
| 100 | Pompa Air | 15 |
| 101 | Pompa Kebakaran/Portable | 8 |
| 102 | Pompa Lainnya (dst) | 4 |
| 103 | Pompa Tangan | 4 |
| 104 | Portable Compressor | 1 |
| 105 | Portable Generating Set | 13 |
| 106 | Portable Water Pump | 2 |
| 107 | Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film) | 1 |
| 108 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 32 |
| 109 | Rak Besi | 12 |
| 110 | Rak Kayu | 1 |
| 111 | Rambu-rambu Lalin Darat lainnya | 24 |
| 112 | Rambu Jalan | 95 |

| No | Nama Barang | Jumlah Aset yang dimiliki (unit) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 113 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 1 |
| 114 | Sekop | 9 |
| 115 | Sepeda Motor | 14 |
| 116 | Sepeda Motor Tril | 2 |
| 117 | Server | 3 |
| 118 | Slide Projector (Lapangan) | 1 |
| 119 | Sound System | 2 |
| 120 | Tablet Machine | 1 |
| 121 | Tangga Aluminium | 1 |
| 122 | Telephone (PABX) | 1 |
| 123 | Televisi | 10 |
| 124 | Tenda | 224 |
| 125 | Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya) | 11 |
| 126 | Tool Kit Box | 7 |
| 127 | Tool Kit Set | 18 |
| 128 | Treng Air/Tandon Air | 20 |
| 129 | Truk Dapur | 1 |
| 130 | Unit Tranceiver VHF Portable | 15 |
| 131 | Utility Trolly | 8 |
| 132 | White Board | 3 |
| 133 | Wireless Amplifier | 1 |

*Sumber Data : SIMDA BMD pada BPBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025*

## 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo**

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra PD Tahun ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ***Renstra 2018-2023*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana | - | - | - | 18,71% | 19,88% | | | | 25,73% | 25,73% | | | | 137,50% | 129,41% | | | |
| 2 | Persentase Korban Tertangani di Kawasan Terpapar Bencana | - | - | - | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | | | |
| 3. | Persentase Aktivasi Pemulihan Dini Pascabencana | - | - | - | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | | | |
| 4. | Terselelenggaranya Sistem Pelaporan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | - | - | - | 81 | 82 | | | | 68,65 | 74,25 | | | | 84,75% | 90,55% | | | |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra PD Tahun ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ***Perubahan Renstra 2018-2023*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Peningkatan Desa Tangguh Bencana | - | - | - | | | 15,76% | 16,36% | | | | 16,67% | 16,67% | | | | 105,77% | 101,87% | |
| 2. | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) | - | - | - | | | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | |
| 3. | Persentase Aktivasi Pemulihan Dini Pascabencana | - | - | - | | | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | |
| 4. | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | - | - | - | | | 81 | 81 | | | | 77,31 | 78,10 | | | | 95,44% | 96,42% | |
| ***Renstra 2024-2026*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana | - | - | - | | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | 100% |
| 2. | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) | - | - | - | | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | 100% |
| 3. | Persentase Capaian Penanganan Pascbencana | - | - | - | | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | 100% |
| 4. | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | - | - | - | | | | | 5% | | | | | 0,51% | | | | | 102,00% |

*Sumber : Data Capaian Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan pada sasaran yang hendak dicapai dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun sasaran pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatnya Pelayanan Kebencanaan Daerah**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

**a. Persentase Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana**

Pada dokumen Renstra 2018-2023, jumlah desa rawan bencana di Kabupaten Probolinggo adalah sebanyak 171 desa. Penentuan 171 desa rawan bencana berdasarkan pemetaan terhadap 6 jenis potensi bencana yang telah dikaji melalui Penyusunan Kajian Kawasan Risiko Bencana yang disusun pada tahun 2016. Sedangkan pada Perubahan Renstra 2018-2023 jumlah desa rawan bencana sebanyak 330 desa berdasarkan pemetaan terhadap 9 jenis potensi bencana yang merupakan hasil kajian pada saat Review Penyusunan Kajian Resiko Bencana pada tahun 2018, sehingga perubahan kwantitas jumlah desa rawan bencana ini berpengaruh pada persentase tingkat capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Pada awal penyusunan Renstra 2018-2023 yaitu pada tahun 2018 realisasi kinerja indikator Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana adalah sebesar 18,71% atau terdapat 32 destana yang terbentuk. Pada tahun 2019 sebesar sebesar 25,73% atau terdapat 44 destana yang terbentuk, pada tahun 2020 tetap sebesar 25,73% karena pada tahun tersebut tidak ada penambahan jumlah destana akibat adanya *recofusing anggaran* yang digunakan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19. Pada tahun 2021 sebesar 29,24% atau terdapat 50 destana yang terbentuk.

Pada tahun 2022 realisasi indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Desa Tangguh Bencana sebesar

16,67% atau terdapat 55 destana yang terbentuk. Secara persentase pada tahun 2022 capaian kinerja mengalami penurunan dari 29,24% di tahun 2021 menurun menjadi 16,67% di tahun 2022, hal ini disebabkan karena perubahan pada jumlah desa rawan bencana yang semula 171 desa menjadi 330 desa, namun secara kwantitas jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 105,77% yaitu dari 50 destana di tahun 2021 menjadi 55 destana di tahun 2022. Pada tahun terakhir periode Renstra yaitu tahun 2023, capaian kinerja ini tetap sebesar 101,89% karena tidak ada penambahan jumlah destana di tahun tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya *refocusing anggaran* sesuai amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Bagian Dana Alokasi Khusus (DAU) yang ditentukan penggunaannya sehingga anggaran yang dialokasikan untuk pembentukan destana pada awal perencanaan harus dialihkan ke sub kegiatan lain yang mendukung amanah PMK 212/2022.

Untuk capaian kinerja pada tahun 2024 Indikator kinerja Persentase Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana diukur berdasarkan Jumlah kegiatan encegahan dan mitigasi yang dilakukan dibagi Jumlah kegiatan pencegahan dan mitigasi dengan tingkat capaian kinerja 100%.

**b. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)**

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja utama Persentase Korban Tertangani di Kawasan Terpapar Bencana pada tahun 2018 hingga tahun 2022 tercapai 100%, artinya seluruh korban bencana telah mendapatkan layanan kedaruratan dan logistik. Begitupula pada tahun 2022-2024 realisasi indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) tercapai 100%. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 berdasarkan kejadian bencana yang terjadi, dari 120 kejadian bencana yang

terjadi, seluruh kejadian bencana telah direspon dan ditangani dengan baik dan cepat dalam waktu kurang dari 24 jam.

**c. Persentase Capaian Penanganan Pascbencana**

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi indikator kinerja Persentase Aktivasi Pemulihan Dini Pascabencana pada tahun 2018 hingga tahun 2023 tercapai 100%. Sedangkan pada tahun 2024 Persentase Capaian Penanganan Pascbencana tercapai 100%. Pengukuran capaian kinerja ini berdasarkan kegiatan penanganan pascabencana yang mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini dilihat dari terlaksananya monitoring dan evaluasi dalam rangka kegiatan rehabilitasi sejumlah 5 (lima) rumah rusak akibat bencana yang terjadi di Kecamatan Gending, Kecamatan Leces, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Pakuniran dan Kecamatan Maron. Juga ada kegiatan perbaikan 2 (dua) sayap jembatan di Kecamatan Lumbang dan perbaikan pipa air bersih di Kecamatan Lumbang.

**2. Meningkatnya Manajemen Kinerja Perangkat Daerah**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2020 Nilai SAKIP pada BPBD adalah 68,65 atau tercapai sebesar 84,75% dari target nilai yang ditetapkan yaitu 81, tahun 2021 memperoleh nilai 74,25 atau tercapai sebesar 91,67% dari target nilai yang ditetapkan yaitu 81.

Untuk tahun 2022 memperoleh nilai 77,31 atau tercapai sebesar 95,44% dari target nilai yang ditetapkan yaitu 81 dan tahun 2023 memperoleh nilai 78,10 atau tercapai sebesar 96,42% dari target nilai yang ditetapkan yaitu 81.

Sedangkan pada tahun 2024 Indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah dapat diketahui dari realisasi pada tahun 2024 sebesar 0,51% dari target yang di tetapkan, sehingga mendapat capaian kinerja sebesar 102%.

**Tabel 2.4**
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo**

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Orang | 33.401 | 1.157.408 | 535.456 | 914.832 | 70.589 |
| | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Orang | 36.574 | 182.900 | 783.663 | 914.832 | 57 |
| | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Orang | 14.381 | 7.457 | 11.360 | 175.771 | 67 |

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Indikator jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana menunjukkan lonjakan anomali pada 2021 dengan capaian sangat tinggi (1.157.408 jiwa), dibandingkan tahun 2020 (33.401 jiwa) dan 2024 (70.589 jiwa). Peningkatan tajam ini kemungkinan merupakan akibat perubahan metode penghitungan atau cakupan layanan, misalnya dengan memasukkan penerima informasi dari berbagai media daring atau penyebarluasan massal melalui platform digital. Meski demikian, hal ini menunjukkan bahwa tahun 2021 terdapat upaya intensif dalam sosialisasi mitigasi bencana, yang berdampak positif pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Hal serupa terlihat pada indikator layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, yang juga melonjak pada 2023 (914.832 jiwa) dari hanya 36.574 pada 2020. Namun, capaian ini kemudian

turun menjadi 57 jiwa pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pemberian layanan tersebut sangat tergantung pada program/ kegiatan tertentu dan kapasitas lapangan, serta kemungkinan kembali terjadi perubahan metode penghitungan atau cakupan kelompok sasaran.

Indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana juga mengalami anomali, yakni tidak ada capaian pada tahun 2021 (7.457 jiwa), yang berbanding terbalik dengan capaian 14.381 jiwa pada 2020, 11.360 jiwa di 2022, dan 175.771 jiwa di 2023. Penurunan ekstrem ini dapat disebabkan oleh nihilnya kejadian bencana yang memerlukan evakuasi, atau hambatan administratif dan pelaporan dalam sistem pencatatan. Penurunan menjadi 67 pada tahun 2024 juga menandakan perlunya penguatan kapasitas respon darurat yang berkelanjutan.

**Tabel 2.5**
**Capaian SPM Trantibumlinmas Kategori Indeks Kebencanaan**
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo**

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan data capaian SPM dari Web e-SPM Bangda Kemendagri, urusan Perumahan Rakyat**,** Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat), khususnya pada kategori Indeks Kebencanaan berhasil mencapai 100%, yang berarti target SPM telah terpenuhi secara penuh.

**Tabel 2.6**
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo**

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| BPBD | 2.053.234.905 | 5.390.165.024 | 7.340.647.207 | 4.308.608.612 | 4.925.076.180 | 2.062.696.702 | 4.894.481.716 | 6.954.597.873 | 4.055.623.221 | 4.564.135.924 | 100,46% | 90,80% | 94,74% | 94,13% | 92,67% | 20.077.670.984 | 18.880.226.697 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.013.661.205 | | | | | 1.013.661.205 | | | | | 100,00% | | | | | 1.013.661.205 | 1.013.661.205 |
| Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 51.810.300 | | | | | 46.244.827 | | | | | 89,26% | | | | | 51.810.300 | 46.244.827 |
| Program Kedaruratan dan Logistik | 801.391.700 | | | | | 821.391.700 | | | | | 102,50% | | | | | 801.391.700 | 821.391.700 |
| Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana | 186.371.700 | | | | | 181.398.970 | | | | | 97,33% | | | | | 186.371.700 | 181.398.970 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 3.870.072.480 | 4.035.924.744 | 3.244.628.612 | 3.655.076.180 | | 3.467.561.407 | 3.702.771.691 | 3.003.713.328 | 3.325.828.224 | | 89,60% | 91,75% | 92,57% | 90,99% | 11.881.641.072 | 10.839.212.071 |
| Program Penanggulangan Bencana | | 1.520.092.544 | 3.304.722.463 | 1.063.980.000 | 1.270.000.000 | | 1.426.920.309 | 3.251.826.182 | 1.051.909.893 | 1.238.307.700 | | 93,87% | 98,40% | 98,87% | 97,50% | 6.142.795.007 | 5.978.317.924 |

*Sumber Data: Realisasi Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024, data diolah*

Berdasar Tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2020-2024 dapat dikatakan sangat baik dan tercapai diatas 90%. Hal ini tidak lepas dari adanya dukungan pimpinan dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan. Meski didukung oleh sumberdaya manusia, sarana prasarana dan peralatan yang terbatas namun Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo juga memaksimalkan fungsi pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan terkoordinasi.

Mekanisme pendanaan dari pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana telah disesuaikan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu meliputi tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Namun demikian dari sisi pendanaan, alokasi anggaran untuk penanganan dan penanggulangan bencana masih sangat terbatas terutama anggaran untuk mitigasi bencana sehingga perlu direview kembali mengingat kondisi alam akhir-akhir ini yang kurang baik dan rentan terjadi bencana.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah:

1. Tantangan
    a. Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam sehingga memerlukan perencanaan penanggulangan bencana
    b. Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Probolinggo dengan potensi bencana yang beragam

c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana
d. Terjadinya bencana yang tidak bisa diprediksi
e. Penurunan kualitas lingkungan

2. Peluang
   a. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam upaya penyelenggaraan perlindungan warga dari bencana, penanggulangan bencana secara tepat
   b. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana
   c. Adanya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengurangan resiko bencana
   d. Berkembangnya tekhnologi dan inovasi dibidang kebencanaan
   e. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana

## 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Salah satu permasalahan utama adalah masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan dan pendidikan teknis bagi aparatur dalam menghadapi situasi darurat bencana, serta belum lengkapnya sarana dan prasarana penanganan darurat seperti logistik, alat komunikasi, dan kendaraan evakuasi. Koordinasi antar lembaga terkait juga belum berjalan optimal, yang sering kali menyebabkan respons yang tidak terorganisir saat terjadi bencana. Keseluruhan permasalahan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta peningkatan sinergi antar sektor dalam menghadapi ancaman bencana di Kabupaten Probolinggo.

Adapun permasalahan penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo diantaranya :

1. **Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana**
   a. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
   b. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana dengan jenis potensi bencana yang beragam;
   c. Kurangnya pelatihan dan pendidikan teknis bagi aparatur kebencanaan;
   d. Kondisi bangunan rumah penduduk di daerah rawan bencana yang tidak memadai sehingga sangat membahayakan bila terjadi bencana;
   e. Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
2. **Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana**
   a. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana dan penanganan layanan komunikasi kedaruratan secara sistematis, terintegrasi, dan akurat;
   b. Koordinasi antar lembaga terkait belum berjalan optimal, yang sering kali menyebabkan respons yang tidak terorganisir saat terjadi bencana;
   c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan.
   d. Minimnya jumlah personil bidang kebencanaan
3. **Permasalahan Bidang Penanganan Pasca/setelah terjadi bencana**
   a. Basis data penanggulangan bencana belum teradministrasi dengan baik;

b. Kurang akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana serta pengkajian kebutuhan pasca bencana;
c. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;
d. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.

## 2.6 Penentuan Isu-isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**
**Teknik Menyimpulkan lsu Strategis**
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana | Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 IV-57) | Perubahan Iklim dan Lingkungan (Climate Change) | Pencegahan dan penanganan perubahan iklim serta mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang semakin serius | Permasalahan lingkungan utamanya meliputi kelangkaan air, potensi banjir di berbagai wilayah dan bajir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa Timur serta pencemaran udara dan air | Peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim; |
| | Kurangnya pendidikan & pelatihan SDM aparatur dalam penanganan pra bencana dan darurat bencana | | | | Wilayah Jawa Timur masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam | Penyediaan sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumber daya untuk respon tanggap darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien; |
| | Belum lengkapnya sarana & prasarana penanganan darurat bencana | | | | | Pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan darurat bencana | | | | | |
| | Kurang akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana serta pengkajian kebutuhan pasca bencana | | | | | |
| | Basis data penanggulangan bencana belum teradministrasi dengan baik | | | | | |
| | Adanya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam namun jumlah SDM terbatas | | | | | |

*Sumber Data: data diolah*

# BAB III

# TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah diukur sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang memiliki indikator terukur dan terarah agar pencapaiannya secara efektif dan efisien.

Didalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo masuk ke dalam Misi ke-5 yaitu SAE Sosial **"Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas"** dengan Tujuan **Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah Berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal**. Untuk mencapai tujuan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam Sasaran ke-2 yaitu **Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas**. Dalam mendukung sasaran tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya dalam pencapaian Indikator Sasaran ke-2 yaitu **Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**.

Tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo akan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra**
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas | 48,07 | 53,64 | 57,51 | 60,77 | 66,11 | 68,60 | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana | 86,61 | 87,17 | 87,83 | 88,94 | 89,50 | 90,06 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | |

**Tabel 3.2**
**Formulasi Indikator Tujuan**
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

| INDIKATOR TUJUAN | | Definisi Operasional Indikator Tujuan | Formula Perhitungan Indikator Tujuan | INDIKATOR TUJUAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Base line | TARGET KINERJA | | | | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas | Mengukur capaian dan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar | $IPT = \sum_{q=1}^{Q} WqIq$<br>**IPT** = Nilai indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas<br>**Wq**= Bobot indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan ke-*i*<br>**Iq**= *Bobot indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan ke-i* | 44,91 | 48,07 | 53,64 | 57,51 | 60,77 | 66,11 | 68,60 |

**Tabel 3.3**
**Formulasi Indikator Sasaran**
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

| SASARAN | | INDIKATOR SASARAN | | Definisi Operasional Indikator Sasaran | Formula Perhitungan Indikator Sasaran | Base line | TARGET KINERJA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana | 1 | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana | Ukuran yang digunakan untuk melakukan penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana | $Y(j) = \sum_{n=1}^{9} a_i X_{ij}$<br>*Yj*= Indeks Trantibumlinmas Sub Kab/kota<br>*ai*= bobot masing-masing indikator<br>Xij= Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kab/kota | 86,06 | 86,61 | 87,17 | 87,83 | 88,94 | 89,50 | 90,06 |

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan maupun sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sangat tergantung pada strategi, arah kebijakan serta program pembangunan yang dipilih. Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran arah kebijakan dan program untuk mencapai tujuan atau kondisi yang diinginkan dan dijanjikan oleh Kepala Daerah di masa mendatang.

Strategi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

1. Peningkatan Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
2. Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
3. Peningkatan Penanganan Pasca Bencana

**Tabel 3.4**
**Penahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

| TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | TAHAP V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Penguatan Dasar-Dasar Kelembagaan dan Data Kebencanaan | Peningkatan Sistem Kewaspadaan dan Mitigasi Bencana | Peningkatan Kapasitas Respon Cepat dan Manajemen Tanggap Darurat | Penguatan Ketangguhan Komunitas dan Rehabilitasi-Pemulihan | Integrasi Ketangguhan Bencana dalam Pembangunan Daerah |

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan antara tujuan dan sasaran sebagaimana dalam table berikut:

**Tabel 3.5**
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra**
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo | Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas dan pemetaan kondisi potensi bencana di seluruh wilayah | Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana | |
| | | | Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat (multi helix) dalam upaya penanganan kedaruratan bencana | |
| | | | Pemulihan kawasan terdampak pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan dengan meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya | |

# BAB IV

# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, berikut disajikan dalam tabel di bawah ini yang memuat program, outcome, indikator outcome serta target dan pagu indikatif :

**Tabel 4.1**
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra**
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas | | | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas | | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana | | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana | | |
| | | | **Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | | **Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana** | **Program Penanggulangan Bencana** | |
| | | | **Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat** | | **Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana** | | |
| | | | **Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana** | | **Persentase Penanganan Pasca Bencana** | | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | *Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana* | *Persentase Capaian Warga di suatu wilayah Yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana* | *Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota* | |
| | | | | | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | |
| | | | | *Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana* | *Persentase Capaian Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana* | *Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana* | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | |
| | | | | | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | |
| | | | | | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Penyusunan Rencana Kontijensi | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota yang sah dan legal | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | |
| | | | | | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | | *Korban bencana yang berhasil di selamatkan dan di evakuasi* | *Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi* | *Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas | |
| | | | | | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | |
| | | | | *Kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak bencana dapat berfungsi dan berjalan dengan baik* | *Persentase fasilitasi pemulihan akibat dampak bencana* | *Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana* | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | |
| | | | | | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Meningkatnya Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah** | | **Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | | | | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan tepat waktu* | *Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas* | *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | *Tersusunnya Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaporkan tepat waktu* | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang Dilaporkan Tepat Waktu* | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | |
| | | | | *Persentase Pemenuhan Administrasi Umum* | *Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | *Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang PD* | *Jumlah Pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah* | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | *Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik* | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik* | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |

Dalam rencana strategis tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo mengampu **Program Penanggulangan Bencana**, dimana terdapat 4 kegiatan yaitu:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   Membandingkan Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan target Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   Membandingkan jumlah Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan target Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   Serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan memindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat yang lebih aman, serta memberikan pertolongan pertama hingga penanganan medis lebih lanjut
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
   Ukuran yang menunjukkan sejauh mana upaya pemulihan telah dilakukan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak bencana, dinyatakan dalam bentuk persentase dari total target pemulihan yang ditetapkan.

## 4.2 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif:

**Tabel 4.2**
**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo**

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | *BASE LINE* | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | 2024 | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | | | 4.499.555.042 | | 4.549.591.784 | | 4.617.417.932 | | 4.711.624.821 | | 4.822.129.284 | |
| **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | 100% | 100% | 960.000.000 | 100% | 970.700.000 | 100% | 985.200.000 | 100% | 1.005.300.000 | 100% | 1.028.900.000 | |
| | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | Persentase Penanganan Pasca Bencana | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASE LINE | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | 2024 | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota* | *Persentase Capaian Warga di suatu wilayah Yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana* | 100 % | 100% | 20.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | |
| Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 dokumen | 1 dokumen | 10.000.000 | 0 | 0 | 1 dokumen | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 300 orang | 300 orang | 10.000.000 | 300 orang | 10.000.000 | 300 orang | 10.000.000 | 300 orang | 10.000.000 | 300 orang | 10.000.000 | |
| *Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana* | *Persentase Capaian Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana* | 100 % | 100% | 655.000.000 | 100% | 662.500.000 | 100% | 652.500.000 | 100% | 662.500.000 | 100% | 662.500.000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASE LINE | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | 2024 | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 0 | 2 unit | 10.000.000 | 2 unit | 200.000.000 | 2 unit | 250.000.000 | 2 unit | 350.000.000 | 2 unit | 450.000.000 | |
| Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 0 | 50 orang | 10.000.000 | 50 orang | 10.000.000 | 50 orang | 10.000.000 | 50 orang | 10.000.000 | 50 orang | 10.000.000 | |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 0 | 10 keluarga | 5.000.000 | 10 keluarga | 5.000.000 | 10 keluarga | 5.000.000 | 10 keluarga | 5.000.000 | 10 keluarga | 5.000.000 | |
| Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 0 | 1 kawasan | 50.000.000 | 1 kawasan | 50.000.000 | 1 kawasan | 50.000.000 | 1 kawasan | 50.000.000 | 1 kawasan | 50.000.000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASE LINE | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | 2024 | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 | 1 dokumen | 10.000.000 | 1 dokumen | 10.000.000 | 1 dokumen | 10.000.000 | 1 dokumen | 10.000.000 | 2 dokumen | 10.000.000 | |
| Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | 0 | 0 | 0 | 1 dokumen | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 0 | 12 laporan | 5.000.000 | 12 laporan | 5.000.000 | 12 laporan | 5.000.000 | 12 laporan | 5.000.000 | 12 laporan | 5.000.000 | |
| Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 | 1 dokumen | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 dokumen | 10.000.000 | 0 | 0 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASE LINE | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | 2024 | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 1 kawasan | 1 kawasan | 555.000.000 | 1 kawasan | 232.500.000 | 1 kawasan | 322.500.000 | 1 kawasan | 222.500.000 | 1 kawasan | 132.500.000 | |
| *Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | *Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi* | 100 % | 100% | 265.000.000 | 100% | 265.000.000 | 100% | 265.000.000 | 100% | 265.000.000 | 100% | 265.000.000 | |
| Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | 0 | 1 Laporan | 5.000.000 | 1 Laporan | 5.000.000 | 1 Laporan | 5.000.000 | 1 Laporan | 5.000.000 | 1 Laporan | 5.000.000 | |
| Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 0 | 2 dokumen | 5.000.000 | 2 dokumen | 5.000.000 | 2 dokumen | 5.000.000 | 2 dokumen | 5.000.000 | 2 dokumen | 5.000.000 | |
| Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 30.000 orang | 5.000 orang | 200.000.000 | 5.000 orang | 200.000.000 | 5.000 orang | 200.000.000 | 5.000 orang | 200.000.000 | 5.000 orang | 200.000.000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASE LINE | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | 2024 | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 10.000 orang | 10.000 orang | 50.000.000 | 10.000 orang | 50.000.000 | 10.000 orang | 50.000.000 | 10.000 orang | 50.000.000 | 10.000 orang | 50.000.000 | |
| Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 0 | 2 Laporan | 5.000.000 | 2 Laporan | 5.000.000 | 2 Laporan | 5.000.000 | 2 Laporan | 5.000.000 | 2 Laporan | 5.000.000 | |
| *Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana* | *Persentase fasilitasi pemulihan akibat dampak bencana* | 100 % | 100% | 20.000.000 | 100% | 33.200.000 | 100% | 47.700.000 | 100% | 67.800.000 | 100% | 91.400.000 | |
| Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 1 dokumen | 1 dokumen | 10.000.000 | 1 dokumen | 10.000.000 | 1 dokumen | 10.000.000 | 1 dokumen | 10.000.000 | 1 dokumen | 10.000.000 | |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASE LINE | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | 2024 | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 0 | 1 kegiatan | 10.000.000 | 1 kegiatan | 10.000.000 | 1 kegiatan | 10.000.000 | 1 kegiatan | 10.000.000 | 1 kegiatan | 10.000.000 | |
| Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 dokumen | 0 | 0 | 1 dokumen | 13.200.000 | 1 dokumen | 27.700.000 | 1 dokumen | 47.800.000 | 1 dokumen | 71.400.000 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | 78,40 | 79,19 | 3.539.555.042 | 79,58 | 3.578.891.784 | 79,98 | 3.632.217.932 | 80,38 | 3.706.324.821 | 80,78 | 3.793.229.284 | |
| *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas* | 100 % | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASE LINE | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | 2024 | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 dokumen | 6 dokumen | 5.000.000 | 6 dokumen | 5.000.000 | 6 dokumen | 5.000.000 | 6 dokumen | 5.000.000 | 6 dokumen | 5.000.000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 dokumen | 32 dokumen | 5.000.000 | 32 dokumen | 5.000.000 | 32 dokumen | 5.000.000 | 32 dokumen | 5.000.000 | 32 dokumen | 5.000.000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 dokumen | 10 dokumen | 5.000.000 | 10 dokumen | 5.000.000 | 10 dokumen | 5.000.000 | 10 dokumen | 5.000.000 | 10 dokumen | 5.000.000 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | 4 laporan | 5.000.000 | 4 laporan | 5.000.000 | 4 laporan | 5.000.000 | 4 laporan | 5.000.000 | 4 laporan | 5.000.000 | |
| *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang Dilaporkan Tepat Waktu* | 1 dokumen | 1 dokumen | 2.764.258.458 | 1 dokumen | 2.803.595.200 | 1 dokumen | .856.921.348 | 1 dokumen | 2.909.527.449 | 1 dokumen | 3.017.932.700 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 orang | 16 orang | 2.751.758.458 | 22 orang | 2.791.095.200 | 25 orang | 2.844.421.348 | 25 orang | 2.897.027.449 | 25 orang | 3.005.432.700 | |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 12.500.000 | 1 dokumen | 12.500.000 | 1 dokumen | 12.500.000 | 1 dokumen | 12.500.000 | 1 dokumen | 12.500.000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASE LINE | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | 2024 | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | 100 % | 100% | 180.000.000 | 100% | 180.000.000 | 100% | 180.000.000 | 100% | 201.500.788 | 100% | 180.000.000 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 paket | 10 paket | 60.000.000 | 10 paket | 60.000.000 | 10 paket | 60.000.000 | 10 paket | 81.500.788 | 10 paket | 60.000.000 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 paket | 5 paket | 5.000.000 | 5 paket | 5.000.000 | 5 paket | 5.000.000 | 5 paket | 5.000.000 | 5 paket | 5.000.000 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 12 laporan | 115.000.000 | 12 laporan | 115.000.000 | 12 laporan | 115.000.000 | 12 laporan | 115.000.000 | 12 laporan | 115.000.000 | |
| *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *Jumlah Pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah* | 12 laporan | 12 laporan | 485.296.584 | 12 laporan | 485.296.584 | 12 laporan | 485.296.584 | 12 laporan | 485.296.584 | 12 laporan | 485.296.584 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 12 laporan | 2.500.000 | 12 laporan | 2.500.000 | 12 laporan | 2.500.000 | 12 laporan | 2.500.000 | 12 laporan | 2.500.000 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 12 laporan | 161.000.000 | 12 laporan | 161.000.000 | 12 laporan | 161.000.000 | 12 laporan | 161.000.000 | 12 laporan | 161.000.000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASE LINE | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | 2024 | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 12 laporan | 321.796.584 | 12 laporan | 321.796.584 | 12 laporan | 321.796.584 | 12 laporan | 321.796.584 | 12 laporan | 321.796.584 | |
| *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik* | 20 unit | 62 unit | 90.000.000 | 62 unit | 90.000.000 | 62 unit | 90.000.000 | 62 unit | 90.000.000 | 62 unit | 90.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 59 unit | 40 unit | 50.000.000 | 40 unit | 50.000.000 | 40 unit | 50.000.000 | 40 unit | 50.000.000 | 40 unit | 50.000.000 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 13 unit | 21 unit | 10.000.000 | 21 unit | 10.000.000 | 21 unit | 10.000.000 | 21 unit | 10.000.000 | 21 unit | 10.000.000 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | 1 unit | 30.000.000 | 1 unit | 30.000.000 | 1 unit | 30.000.000 | 1 unit | 30.000.000 | 1 unit | 30.000.000 | |

## 4.3 Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Keseluruhan sub kegiatan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam mendukung RPJMD tahun 2025-2029 berperan dan saling mendukung pencapaian tujuan dan sasaran keseluruhan organisasi. Beberapa kegiatan yang mendukung dalam program prioritas Kepala Daerah yaitu SAE sebagaimana pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**
**Daftar Subkegiatan Prioritas**
**dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN /SUBKEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana | Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | ***Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*** | SAE LAYANAN: Mata Prabulinggih - Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat |
| | | | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | |
| | | | ***Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*** | |
| | | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | |
| | | | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | |
| | | | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | |
| | | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | |
| | | | Penyusunan Rencana Kontijensi | |
| | | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | |
| | | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | Meningkatnya penanganan bencana pada | ***Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*** | SAE LAYANAN: Mata Prabulinggih |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN /SUBKEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | saat tanggap darurat | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | - Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat |
| | | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | |
| | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | ***Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*** | SAE LAYANAN: Mata Prabulinggih - Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat |
| | | | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | |
| | | | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | |
| | | | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | |

Adapun Indikator sasaran rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pencapaian sasaran organisasi sebagai berikut:

**Tabel 4.4**
**Indikator Kinerja Utama**
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo**

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | KET. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana | Nilai | 86,06 | 86,61 | 87,17 | 87,83 | 88,94 | 89,50 | 90,06 |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase | 0,50% | 0,51% | 0,52% | 0,54% | 0,56% | 0,58% | 0,60% |

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan

pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja urusan pemerintahan digunakan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan dan pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Uraian IKK dan rencana target IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

**Tabel 4.5**
**Indikator Kinerja Kunci**
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo**

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | KET. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Persentase (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persentase (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

# BAB V

# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo berlaku selama 5 tahun dari tahun 2025-2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Probolinggo.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta

memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pendanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.

Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian meliputi pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis antara rencana dengan realisasi, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah korektif atas permasalahan yang muncul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui dua mekanisme utama:

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;
2. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Demikian kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

Probolinggo, September 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

**R. OEMAR SJARIEF, S.T., M.T.**
Pembina Tingkat I
NIP. 19720719 200312 1 003

# RENCANA STRATEGIS

# SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

# KABUPATEN PROBOLINGGO

# TAHUN 2025-2029

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2025 - 2029

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 -2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 -2029 Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 -2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan BAPPELITBANGDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong PrajaTahun 2025 -2029 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

Probolinggo, Juli 2025

**KEPALA**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PROBOLINGGO

**SUGENG WIYANTO,S.Sos,MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 19690322 199703 1 002

# DAFTAR ISI


Halaman

Kata Pengantar..... 0
Daftar isi..... i
Daftar Tabel..... ii
Daftar Gambar..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1.

1. Latar belakang;..... 1.
2. Dasar hukum penyusunan..... 2.
3. Maksud dan tujuan..... 6.
4. Sistematika penulisan..... 7.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 12.

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 12.
   a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah..... 14.
   b. Sumber daya Perangkat Daerah..... 18
   c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (terrnasuk capaian SPM sesuai denga tupoksinya)..... 21.
2. Subbab Permasalahan dan lsu Strategis Perangkat Daerah..... 30.
   a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
   b. Isu strategis..... 34.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 43.

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029..... 43.
2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029..... 50.
3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029..... 53.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARMN BIDANG URUSAN..... 54.

1. Uraian Program,Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif... 56
2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui lndikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah..... 97
3. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... 98
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah..... 99

BAB V PENUTUP..... 101

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.a. Susunan Kepegawaian berdasarkan jabatan..... 23

Tabel 2.2.b. Sarpras sampai akhir 2024..... 24

Tabel 2.3.a. Pencapaian Kinerja Pelayanan IKK 2020-2024..... 27

Tabel 2.3.b. Pencapaian Kinerja Pelayanan SPM ..... 28

Tabel 2.3.c. Pencapaian Kinerja Pelayanan IKU 2020-2024..... 29

Tabel 2.3.d. Anggaran dan Realisasi 2020-2024..... 31

Tabel 2.5.a. Pemetaan Permasalahan Pelayanan..... 35

Tabel 2.6.a .Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kab. Probolinggo..... 37

Tabel 2.6.b. Telaah Renstra K/L dan Provinsi..... 38

Tabel 2.6.c. Telaah Isu Strategis Renstra Provinsi..... 39

Tabel 2.6.d. Telaah Isu Strategis RTRW..... 40

Tabel 2.6.d. Telaah Isu Strategis KLHS..... 42

Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis .....' 45

Tabel 3.1.a. Tujuan,Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 47

Tabel 3.1.b. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra..... 50

Tabel 3.2.a. Mapping Strategi Renstra 2025 -2029..... 53

Tabel 3.2.b. Pentahapan Pembangunan..... 54

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra 2025 -2029..... 57

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan..... 61

Tabel 4.2 Matrik Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator..... 83

Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan dan Pendanaan.... 86

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama..... 97

Tabel 4.6 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Cascading struktur Satuan Polisi Pamong Praja..... 22

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

**Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025-2029 dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris) dan Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi)** yang telah di lantik pada tanggal 20 Februari 2025, menuangkan visi, misi, dan komitmen politik dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2025 hingga 2029.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Selainitu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra

Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Probolinggo.

**1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); III |

3 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik III | 4 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868)

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor III | 5 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri III | 6 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017)

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik III | 7 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo;

38. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E)

39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

40. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ;

41. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo;

47. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

48. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut :

Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;

Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 antara lain:

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;

Menyediakan tolakukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 ini di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Penyusunan pada tiap-tiap bab sesuai Sistematika Renstra PD, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1. Memuat latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.
2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci **(IKK).**
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
4. Penyajian pada bah ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
    a. Tugas, fungsi dan struktur PD;
    b. Sumber daya PD;
    c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
    d. Kelompok sasaran pelayanan PD;
5. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat

menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

6. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
7. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembagapemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun basil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.
8. Merumuskan isu strategis daerah {dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
    a. permasalahan;
    b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
    c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan..

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
    a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;dan
    b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat mt, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
3. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu} dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:
    a. kalimat kondisi;
    b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
    c. disusun dengan bahasayangjelas dan mudah dipahami; dan
    d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome.*
5. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi

lingkungan yang dinamis untukmencapaitujuan/sasaran Renstra PD.

6. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.
7. Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
8. Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan / atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
9. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya
3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

BAB V PENUTUP

B. Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029

APIP daerah melakukan reviu terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029. Subtansi Reviu APIP atas Rankhir Renstra PD Tahun 2025- 2029 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah dan/ atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
2) keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi Perangkat Daerah

pemangku urusan);

3) konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, dan subkegiatan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025- 2029;

4) kesesuaian antara target kinerja Rankhir Renstra PD Tahun 2025- 2029 dengan pengendalian dan evaluasi basil capaian kinerja Renstra PD periode 2020-2024; dan

5) ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya.

C. Penyelarasan Renstra PD terhadap **RPJMN** Tahun 2025-2029

Tim Penyusun RPJMD melakukan penyelarasan Renstra PD Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain:

a. Periodesasi;

b. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

c. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional yang telah ditentukan lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

d. Kinerja tujuan, sasaran, dan *outcome* serta indikator Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk mendukung RPJMN Tahun 2025-2029; dan

e. Indikator kinerja urusan yang bersifat konkuren beserta targetnya sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan/ atau NSPK yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga.

D. Kinerja Renstra PD Per Urusan Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Daerah kewenangan provinsi memiliki tujuan dan *outcome* yang dapat disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah*). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas,

### Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

**A. KEPALA SATUAN**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan mempunyai fungsi : perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; pelaksanaan administrasi dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; pembinaan terhadap Unit Pelaksana, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**B. SEKRETARIS**

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

Pengoordinasiandan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana Program dan kegiatan;

Penyiapanbahankoordinasipelaksanaansistempengendalianintern pemerintah dan pengelolaan informasi;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;

Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;

Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan.

**B.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**B.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah;
pengelolaan urusan administrasi keuangan;
pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

**C. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.**

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan perundang-undangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

penyusunan perencanaan kegiatan, perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;

pelaksanaan program pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;

penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

**C.1. Kepala Seksi Penindakan**

Kepala Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penindakan mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;

Penyiapan bahan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;

Penyelenggaraan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang- undangan daerah lainnya;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**C.2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.**

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

Penyusunan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;

Penyusunan bahan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**D. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat**

Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

perumusan dan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan teknis pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

pelaksanaan teknis pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasinal Prosedur (SOP);

penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

**D.1. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan**

Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengamanan dan Pengawalan wilayah, pengamanan dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati, pejabat VVIP serta kegiatan pemerintah daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai fungsi :

penyiapan bahan perumusan teknis Pengamanan dan Pengawalan wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

penyiapan bahan Pengamanan dan Pengawalan wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

penyelenggaraan Pengamanan dan Pengawalan wilayah

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pengamanan dan Pengawalan wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**D.2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat**

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dalam pengelolaan data, pembinaan, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
penyiapan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas perlindungan masyarakat;
penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat;
penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
penyiapan bahan pembinaan perlindungan masyarakat;

penyiapan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
penyelenggaraan pembentukan, kebutuhan dan pelatihan perlindungan masyarakat;
pengawasan dan evaluasi pelaksanaanpembentukan, kebutuhan dan pelatihan perlindungan masyarakat; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**E. Kepala Bidang Pencegahan, Keselamatan serta Pengendalian Kebakaran dan Non Kebakaran**

Kepala Bidang Pencegahan, Keselamatan serta Pengendalian Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan, Pencegahan, Keselamatan serta Pengendalian Kebakaran dan Non Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan, Keselamatan serta Pengendalian Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai fungsi :

perumusan kebijakan teknis penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;

pengoordinasian kegiatan teknis dibidang penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;

pelaksanaan dan menyelenggarakan kegiatan teknis dibidang penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;

penyusunan rencana kegiatan penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;

penyelenggaraan urusan ketatausahaan penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

**E.1. Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan Kebakaran**

Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional Investigasi dan Pendataan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan Kebakaran mempunyai fungsi :

menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran;

mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran;

mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran;

melaksanakan tugas dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai rencana kerja;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang

investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**E.2. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran**

Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pencegahan kebakaran dan non kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai fungsi :

penyiapan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pencegahan kebakaran dan non kebakaran;

pelaksanaan inventarisasi terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada perusahaan, toko-toko dan organisasi perangkat daerah yang telah habis masa berlakunya;

pelaksanaan urusan pemadaman kebakaran, penjagaan rutin, kewaspadaan/pengawasan terhadap bahaya kebakaran dan pertolongan-pertolongan yang dengan kebakaran dan non kebakaran;

penyiapan langkah-langkah pendeteksian, laporan dan penanggulangan menghadapi gangguan ancaman, bahaya serta non kebakaran lainnya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

penyuluhan pencegahan kebakaran dan non kebakaran;

penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan pencegahan kebakaran dan non kebakaran;

pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan kebakaran dan non kebakaran;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**F. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan sesuai dengan keahlian.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**G. UPT**

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) huruf g ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Probolinggo disebutkan bahwa susunan organisasi Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, terdiri dari :

Gambar 2.1

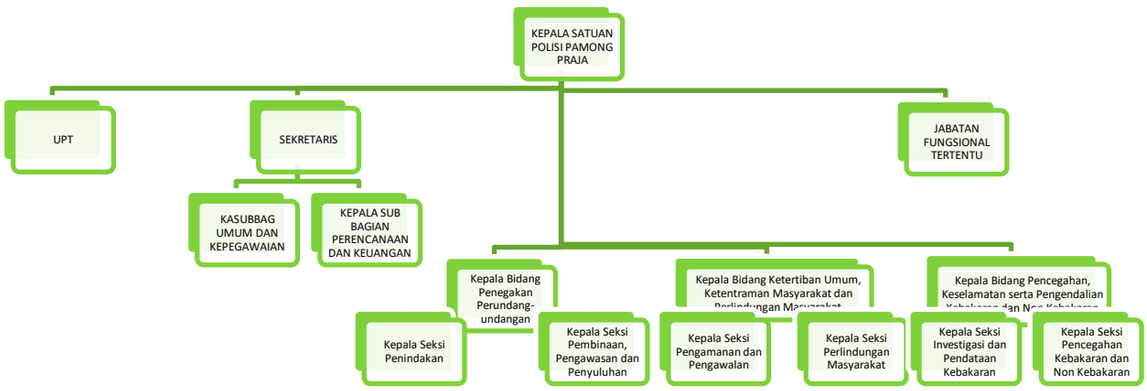


**2.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja**

Pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan factor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumberdaya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan professional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja.

**Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai struktur organisasi terdiri dari 246 Orang. Adapun Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo terdiri dari:

**Tabel 2.2.a**

**Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Tahun 2025**

| No | Jabatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kepala Satuan | 1 | Orang |
| 2. | Sekretaris | 1 | Orang |
| 3. | Kepala Bidang | 3 | Orang |
| 4. | Kepala Sub Bagian | 2 | Orang |
| 5. | Kepala Seksi | 6 | Orang |
| 6. | Fungsional | 27 | Orang |
| 7. | Staf Pelaksana | 38 | Orang |
| 8. | PPPK | 14 | Orang |
| 9. | Non PNS | 154 | Orang |
| - | Jumlah | **246** | Orang - |

Eslon II : 1

Eslon III : 3

Eslon IV : 9

Pejabat fungsional : 27

Staf/Non Eslon : 52

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 92 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Sarjana S-2 : 7

Sarjana S-1 : 25

Diploma -3 : 1

SLTA : 63

SLTP :

SD :

**Kondisi Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja**

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja

**Tabel 2.2.b.**
**SARPRAS SAMPAI AKHIR 2024**

| No. | NAMA BARANG | JUMLAH ASSET YANG DI MILIKI/ UNIT | RP | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mobil Pemadam Kebakaran | 4 | 5.896.507.500,00 | B |
| | | 1 | 201.000.000,00 | RR |
| 2 | Mobil Suplai | 2 | 1.264.500.000,00 | B |
| 3 | Minibus | 2 | 403.947.750,00 | B |
| 4 | Kendaraan Roda 2/Sepeda Motor | 27 | 471.804.687,00 | B |
| 6 | Tameng Fiber/Mika | 26 | 35.120.000,00 | RR |
| 7 | Tangga Alumunium | 3 | 8.372.500,00 | B |
| 8 | Tandu | 4 | 5.800.000,00 | B |
| 9 | Kasur | 7 | 3.950.000,00 | B |
| 10 | AC | 12 | 60.288.000,00 | B |
| 11 | Alat Komunikasi Telephone Lainnya | 3 | 16.417.500,00 | B |
| 12 | Alat Deteksi Senjata/Metal | 4 | 7.880.000,00 | B |
| 13 | Alat Pemadam Kebakaran Lainnya | 10 | 18.470.000,00 | B |
| 14 | Bangku Tunggu | 1 | 3.955.000,00 | RR |
| 15 | Bracket Standing Peralatan | 1 | 197.000,00 | B |
| 16 | Camera Film | 3 | 47.839.300,00 | B |
| 17 | CCTV | 4 | 19.880.000,00 | B |
| 18 | Charger | 1 | 7.000.000,00 | B |
| 19 | Genset | 2 | 9.580.000,00 | B |
| 20 | Handy Talky | 126 | 296.800.000,00 | B |
| 21 | Hard Disk | 3 | 10.755.000,00 | B |
| 22 | Helm Fiber | 4 | 2.000.000,00 | RR |
| 23 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 10 | 37.100.000,00 | B |
| | | 2 | 2.990.000,00 | RR |
| 24 | Kursi Lipat | 30 | 12.900.000,00 | RR |
| 25 | Kursi Tamu | 1 | 4.100.000,00 | B |
| 26 | Sirine | 3 | 6.140.000,00 | B |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 19.200.000,00 | RR |
| 27 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 2 | 6.950.000,00 | B |
| | | 1 | 7.000.000,00 | RR |
| 28 | LapTop | 19 | 239.518.223,00 | B(Baik) |
| | | 4 | 37.058.160,00 | RR |
| 29 | Lemari Kayu | 2 | 4.250.000,00 | RR |
| 30 | Lighting Stand Tripod+Proyektor | 2 | 8.520.000,00 | B |
| 31 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 2 | 10.562.500,00 | B |
| 32 | Meja Rapat | 1 | 6.485.000,00 | B |
| 33 | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II | 1 | 49.925.000,00 | B |
| 34 | Mesin Gerinda | 2 | 4.695.000,00 | B |
| 35 | P.C Unit/ Komputer PC | 6 | 67.329.000,00 | B |
| 36 | Pick Up | 4 | 961.575.000,00 | B |
| 37 | Pistol | 5 | 12.800.000,00 | B |
| 38 | Pompa Air | 3 | 9.283.000,00 | B |
| 39 | Pompa Kebakaran/Portable | 1 | 14.789.500,00 | B |
| 40 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 10 | 49.252.000,00 | B |
| 41 | Senter | 10 | 2.250.000,00 | RR |
| 42 | Sound System | 2 | 47.890.000,00 | B |
| | | 2 | 12.215.000,00 | RR |
| 43 | Tablet PC | 3 | 29.510.000,00 | B |
| 44 | Tabung Gas | 1 | 1.300.000,00 | RR |
| 45 | Televisi | 1 | 28.000.000,00 | B |
| | **JUMLAH** | **383** | **10.485.651.620,00** | |

### 2.1.c. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Serta Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo, maka Satuan Polisi Pamong Praja telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Fungsi yang dijalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, menyiapkan dan

menyusun Peraturan Daerah maka produk dan layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut;

**1) Produk:**

a. Berkurangnya pelanggaran terhadap produk Hukum/Perda yang telah di Undangkan.
b. Terciptanyanya Ketentraman Dan Ketertiban Di Lingkungan Masyarakat Yang Lebih Kondusif.
c. Tanggapnya Masyarakat Terhadap Bahaya Bencana Kebakaran
d. Terciptanya Keamanan Lingkungan Di Setiap Perdesaan

**2) Layanan:**

a. Melaksanakan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Serta Kegiatan Pembinaan Dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah.
b. Melaksanakan Peningkatan Pengawasan Ketertiban Umum Di Masyarakat
c. Melaksanakan Penanganan Serta Pencegahan Dini Terhadap Bencana Kebakaran.
d. Melaksanakan Pembinaan Terhadap Satlinmas

Adapun pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 2.3.a*

*Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo*

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target IKK | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 85% | 90 | 93 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 85% | 90 | 93 | 95 | 95 | 95 | 100 | 58.82 | 23.53 | 100 | 52.63 |
| 3 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | 15 menit | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 17.7 | 15.3 | 15 | 13 |

**Tabel 2.3.b**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

| No | Uraian lndikator | Satuan | SPM / Standard Nasional | Target Renstra Perangkat Daerah | | | Realisasi Capaian | Proyeksi Capaian (%) | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun **2024** | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun **2024** | Tahun 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum | % | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab / Kota (trantibum) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2. | Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit | menit | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar) | 15 | 12.5 | 12 | 13 | 100 | |
| 3. | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | | 76 | 76 | 76.15 | 76.96 | 100 | |

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja utama masing-masing sasaran sudah terpenuh

TABEL 2.3.c

CAPAIAN IKU TARGET DAN REALISASA 2020 - 2024

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TAGET IKU TAHUN | | | | | REALISASI IKU TAHUN | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Persentase Pelayanan Penegakan Pelanggaran Perda | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan ketertiban umum | Persen | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | - | -5.49 | -10.42 | 28.30 | 1.32 | - | |
| 3 | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Bencana lainnya | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Nilai LHE AKIP PD | nilai | n/a | n/a | n/a | n/a | 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | 76.11 | |

Capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Probolinggo selama periode 2020 2024 secara umum menunjukkan performa yang cukup stabil pada beberapa indikator, namun juga mengalami fluktuasi signifikan pada indikator tertentu yang mengindikasikan adanya tantangan teknis, administratif, maupun operasional. Indikator penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) menunjukkan capaian 100% secara konsisten selama lima tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan adanya sistem respons yang efektif dalam menangani gangguan trantibum, serta kerja sama lintas sektor yang baik antara aparat penegak perda, Satpol PP dan instansi terkait. Namun demikian, indikator penegakan Perda dan Perkada mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Setelah mencatat capaian sempurna (100%) pada 2020, indikator ini turun drastis ke 58,82% pada 2021 dan 23,53% pada 2022, sebelum kembali naik pada 2023 (100%) dan turun kembali pada 2024 (52,63%). Penurunan tajam pada 2021–2022 kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan kegiatan lapangan akibat pandemi COVID-19, dan bisa juga terjadi karena perbedaan metode pengukuran atau perubahan cakupan perda yang menjadi objek penegakan. Fluktuasi ini berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas regulasi daerah dalam menjaga ketertiban umum.

Sementara itu, indikator pelayanan evakuasi korban kebakaran menunjukkan konsistensi capaian 100% dari 2020 hingga 2024, menandakan bahwa pelayanan damkar telah tersedia dengan baik dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran menunjukkan trend positif, yakni penurunan waktu dari 16,5 menit di tahun 2020 menjadi 13 menit di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan peningkatan efisiensi layanan pemadam kebakaran yang mungkin didukung oleh peningkatan sarana/prasarana, kesiapsiagaan personel, dan penguatan koordinasi wilayah. Capaian urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menunjukkan kecenderungan positif dalam respons terhadap gangguan ketertiban dan pelayanan kebencanaan. Namun, fluktuasi tajam pada beberapa indikator, terutama yang berbasis jumlah warga penerima layanan, menunjukkan pentingnya konsistensi dalam metodologi penghitungan serta perlunya penguatan data berbasis sistem informasi terpadu.

Tabel 2.3.d

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo

| Uraian | Anggaran Pada Tahun | | | | | RealisasiAnggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasionantara Realisasi dan Anggararan Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.148.425.420 | 16.144.649.144 | 23.463.216.664 | 16.862.648.653 | 18.007.889.435 | 6.083.855.839 | 15.187.494.584 | 21.800.280.247 | 16.208.801.544 | 17.113.893.844 | 98.95% | 94.07% | 93% | 96.12 | 95.03 | | |
| Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 656.987.900 | 774.816.040 | 3.342.800.100 | 3.653.234.356 | 3.797.741.57.9 | 655.371.250 | 549.591.205 | 2.431.812.990 | 3.306.873.849 | 3.089.694.162 | 99.75% | 70.93% | 70.93% | 90.51 | 81.36 | | |
| Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 150.987.500 | 274.332.000 | 2.698.801.100 | 2.298.907.000 | 1.734.431.600 | 149.706.000 | 198.994.580 | 2.580.907.000 | 2.289.756.245 | 1.681.295.269 | 99.15% | 72.53% | 95.63% | 99.60 | 97.01 | | |

*Sumber Data: Realisasi Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024, data diolah*

Dari tabel di atas dapat dianalisa efektivitas anggaran yang mendukung indikator kinerja pelayanan publik Satpol PP Kabupaten Probolinggo periode 2020-2024 sebagai katagori Baik;

Adapun faktor penunjang keberhasilan pencapaian target indikator tersebut adalah :

Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi perangkat daerah yang diikuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di dalam pencapaian target indikator kinerja;

Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan oraganisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas;

Adanya peraturan / perundang-undangan yang mendukung Tupoksi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Faktor lain yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Satpol PP adalah :

Adanya dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator kinerja;

Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan oraganisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas;

Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;

Adanya dukungan dari aparat kewilayahan dan masyarakat

Dibentuknya Unit khusus, TRC (Team Reaksi Cepat), Adanya tenaga bantuan Linmas yang membantu tugas Satpol PP didalam memelihara ketenteraman masyarakat.

Dibentuknya Satuan Relawan Kebakaran (REDKAR) disetiap Desa untuk membantu tugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Probolinggo dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Awal Kebakaran.

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerjaSatuan Polisi Pamong Praja dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

Faktor Interal

Kekuatan

Adanya dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator kinerja

Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Telah Dibentuknya Team Khusus Evakuasi Dan Penyelamatan Pada Subid Pemadam Kebakaran Dalam Merespon Dan Melayani Masyarakat Terkait Laporan Masyarakat Yang Semakin Meningkat Melalui Call Canter 112 Dan Media Sosial

Telah Dibentuknya Satuan Relawan Kebakaran ( REDKAR) ditingkat Desa dan Kelurahan Untuk membantu Pemadam Kebakaran Dalam Penanganan Awal Kejadian Kebakaran.

Adanya tenaga bantuan Linmas yang membantu tugas Satpol PP didalam memelihara ketenteraman masyarakat.

Kelemahan

Belum adanya Perda Tentang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum;

Beban kerja yang cukup besar dibanding jumlah tenaga yang berkualisifikasi dalam pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

Faktor Eksternal

Peluang

Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan oraganisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas

Tantangan

Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

## 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

A. Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil.Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan polisi Pamong Praja tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan permasalahan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

| No. | Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum, Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing. (SAE) | Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dalam Peningkatan Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas | Tingkat ketertiban Masyarakat cenderung rendah, Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kabupaten Probolinggo |
| | | Masih rendahnya penegakan hukum | Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda. |
| | | Masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran dan non kebakaran | Masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik Pos Damkar, mobil damkar maupun sarana Pelayanan Non Kebakaran apabila dibandingkan Wilayah Manejemen Kebakaran (WMK) |
| | | | Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran |
| | | | Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar proteksi kebakaran |

Dalam pelaksanaan tugas terdapat beberapa hambatan dan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi diantaranya :

1. Penegakan Perda/Perkada sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran. Tanpa dukungan anggaran yang cukup maka akan kesulitan dalam melaksanakan tugas baik dari segi jumlah personil, fasilitas operasional maupun sarana dan prasarana pendukung
2. Penegakan Perda / Perkada sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara berbagai Lembaga atau lnstansi Pemerintah. Misalnya

Peraturan yang melibatkan lebih dari satu sektor, sering kali tidak optimal dalam tindak lanjut dengan baik karena kurangnya informasi terkait data dukung pelanggaran Perda/Perkada tersebut.

3. Masih tinggi angka Pelanggaran Perda/Perkada
4. Kurangnya Sumber daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai dan mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan Pelanggaran Perda / Perkada tersebut
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda/Perkada
7. Masih kurangnya anggota Damkar memiliki keahlian Pemadam I
8. Ketersediaan tenaga Pemadam Kebakaran yang di rasa masih kurang
9. Pengisian Pos Sektor dan penunjang peralatan yang masih kurang
10. Terkendalanya penyediaan sumber air di saat kemarau Panjang dan kondisi geografis Kab. Probolinggo wilayah Selatan berupa Pegunungan
11. Adanya penyesuaian terhadap regulasi yang sering berubah
12. Adanya perbedaan dalam menerapkan suatu aturan atau regulasi

## *2.6* Penentuan Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja

### 2.6.a. Telaah Isu Strategis RPJMD

Visi dan misi Kabupaten Probolinggo mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil BupatiTerpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah : *"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing. (SAE)."*

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah.

1. MISI 1: SAE PEMERINTAHAN: Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif.;

2. MISI 2: SAE EKONOMI: Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas;

3. MISI 3: SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN: Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau;

4. MISI 4: SAE INFRASTRUKTUR Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata

5. MISI 5: SAE SOSIAL : pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo memiliki keterkaitan dengan Misi ke 5 Tujuan ke 5 dan Sasaran ke 2 dari RPJMD Kabupaten ProbolinggoTahun 2025 -2029. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo berperan untuk meningkatkan ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo perlu mengidentifikasi factor penghambat dan factor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini;

*Tabel 2.6.a*

*Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo*

| No | Misi | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|---|
| 1. | Misi ke 5 :<br><br>SAE SOSIAL : pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas | - Standar Operasi Prosedur yang Jelas;<br><br>- Pelatihan Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM;<br><br>- Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait.<br><br>- Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | -Kurangnya SDM yang handal;<br><br>- Keterbatasan personil yang kompeten dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi;<br><br>- Koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan dengan instansi yang terkait dalam penanganan permasalahan.<br><br>- Dukungan Anggaran yang Kurang Memadai; |

**2.6.b. Telaah Isu Strategis Kementrian / Lembaga**

Telaahan dilakukan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri mengingat pengelolaan Satpol-PP di tingkat pusat berada di bawah kendali Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan sehubungan dengan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selalu memuat visi, misi Kepala Daerah 2025-2029 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 serta arah pembangunannya.

Dalam penyusunan Renstra 2025-2029 Satpol PP Kabupaten Probolinggo harus mengacu pada Renstra 2024-2026 sebelumnya karena pada bagian ini akan di jabarkan keterkaitan antar dokumen baik Penyusunan Renstra RPJMD maupun Renja RKPD. Renstra disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selanjutnya terkait tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Probolinggo adalah berada dalam wilayah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dimana salah satu acuan penyusunan Renstra 2025-2029 berkaitan dengan SPM yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
{Trantibum) serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar).

Dari Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas dimana keterkaitan dengan Sasaran Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Probolinggo adalah meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dengan indikator persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 2.6.b.

Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

| SasaranRenstra K/L | PermasalahanPerangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | Pendukung | Penghambat |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Dengan Indikator Kinerja Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Sesuai SPM | 1.Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan<br><br>2.Kualitas SDM yang belum seimbang dengan beban tugas<br><br>3.Belum ada kegiatan peningkatan kualias SDM<br><br>4.Terbatasnya Sarana penunjang kegiatan<br><br>5.Terbatasnya anggaran operasional<br><br>6.tingginya angka pelanggaran Perda<br><br>7. Tidak adanya Pengawasan K/L Terhadap Kekurangan sumber daya dan sarpras di daerah | 1.Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat<br><br>2.Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja<br><br>3.Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas<br><br>4.Penambahan sarana dan prasarana operasional | 1.keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.<br><br>2.Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum;<br><br>3.Beban kerja yang cukup besar dibanding jumlah tenaga yang berkualisifikasi dalam pegawai SatuanPolisiPamong Praja<br><br>4.Tingkat ketertiban Masyarakat cenderung rendah |
| meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubenur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan ( kawasan khusus dan kawasan perKabupaten ), dan batas antar negara, serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran. | 1.Prosentase kinerja peran Bupati sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;<br><br>2.Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah ;<br><br>3.Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah ;<br><br>4.Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai<br><br>SPM ( Standar Pelayanan Minimal )<br><br>5.Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) | 1.Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat<br><br>2.Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja<br><br>3.Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas<br><br>4.Penambahan sarana dan prasarana operasional | 1.keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.<br><br>2.Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum;<br><br>3.Beban kerja yang cukup besar dibanding jumlah tenaga yang berkualisifikasi dalam pegawai SatuanPolisiPamong Praja<br><br>4.Tingkat ketertiban Masyarakat cenderung rendah |

**2.6.c. Telaah Isu Strategis Renstra Provinsi**

Tabel 2.6.c.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

| Sasaran Renstra Provinsi | Permasalahan Perangkat Daerah | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|
| Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, berdaya guna, partisipatif. | - Keterbatasan SDM: jumlah personel & kompetensi.<br>- Anggaran operasional & belanja modal terbatas.<br>- Sarana prasarana kurang.<br>- Indikator kinerja belum sepenuhnya selaras dengan provinsi. | - Landasan hukum & arah kebijakan jelas.<br>- Data & dokumen perencanaan tersedia.<br>- Dukungan pemda.<br>- Kesadaran publik meningkat. | - Alokasi anggaran belum memadai.<br>- Beban tugas melebar.<br>- Sistem M&E lemah. | 1. Selaraskan indikator Renstra Satpol PP dengan sasaran provinsi.<br>2. Penguatan kapasitas & sarana.<br>3. Perkuat sistem M&E internal. |
| Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan Perda sebagai bagian dari ketahanan daerah. | - Koordinasi lintas sektor belum optimal.<br>- Kepatuhan masyarakat rendah.<br>- Keterbatasan sarana prasarana untuk penertiban.<br>- Penegakan berhenti pada sanksi administratif. | - Payung hukum penegakan Perda jelas.<br>- Dukungan pemda dalam operasi penertiban.<br>- Potensi kerja sama lintas sektor. | - Keterbatasan koordinasi hukum.<br>- Anggaran terbatas untuk operasi lapangan.<br>- Sarana prasarana terbatas. | 1. Buat SOP koordinasi lintas institusi (Polri, DLH, Dishub, Kejaksaan).<br>2. Ajukan tambahan anggaran operasional penertiban.<br>3. Tingkatkan sosialisasi & edukasi kepatuhan masyarakat. |

2.6.d. Telaah Isu Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, memiliki factor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang ditinjau dari implikasi RT RW dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.6.d.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi RTRW

| No. | Telaah RT RW terkait Tupoksi | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|---|
| 1. | Berdasarkan Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Probolinggo, urusan yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak berkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Probolinggo. isu strategis Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Merupakan Pelayanan satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja walaupun secara tidak langsung | 1.Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat<br>2.Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja<br>3.Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas<br>4.Penambahan sarana dan prasarana operasional | 1.Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan<br>2.Kualitas SDM yang belum seimbang dengan beban tugas<br>3.Belum ada kegiatan peningkatan kualias SDM<br>4.Terbatasnya Sarana penunjang kegiatan<br>5.Terbatasnya anggaran operasional |
| 2. | Sebagaimana Pada Misi 4 “SAE SOSIAL : pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas” Kemudian Pada Tujuan “Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal.”<br>Pada Poin ini Satpol PP dan Pemadam Kebakaran ada Keterkaitan langsung ataupun Tidak Langsung Terutama Pada Strategi “Meningkatkan mitigasi dan tanggap bencana melalui optimalisasi program koordinatif dan penanganan bencana berbasis masyarakat. Karena Kejadian Kebakaran Juga masuk dalam Kebencanaan | 1.Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat<br>2.Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja<br>3.Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas<br>4.Penambahan sarana dan prasarana operasional | 1.keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.<br>2.Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum;<br>3.Beban kerja yang cukup besar dibanding jumlah tenaga yang berkualisifikasi dalam pegawai SatuanPolisiPamong Praja<br>4.Tingkat ketertiban Masyarakat cenderung rendah |

Implikasi RTRW terhadap pelayanan Satpol PP dapat menjadi **pendorong** jika perencanaan ruang diikuti secara konsisten dan didukung infrastruktur, tetapi juga menjadi **penghambat** bila implementasi tidak sesuai, akses darurat terabaikan,

atau terjadi konflik kepentingan antara kebutuhan masyarakat dan aturan tata ruang.

2.6.e. Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Misi SAE Sosial menekankan pada pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan, dan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, Satpol PP & Damkar berperan tidak hanya sebagai aparat penegak ketertiban, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat yang inklusif dan adaptif. Dengan demikian, factor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6.e.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP & Damkar ditinjau dari Implikasi KLHS dan Misi SAE Sosial

| No | Telaah KLHS & Misi SAE Sosial terkait Tupoksi | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemberdayaan Perempuan: perlindungan perempuan di ruang publik, serta keterlibatan dalam forum masyarakat. | 1. Adanya kelompok perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial.<br>2. Program pemberdayaan perempuan di tingkat desa/kelurahan.<br>3. Dukungan regulasi kesetaraan gender. | 1. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur Satpol PP & Linmas.<br>2. Minimnya pelatihan berbasis gender.<br>3. Masih adanya kasus diskriminasi berbasis gender. |
| 2 | Masyarakat Adat (Tengger & komunitas lokal): penghormatan terhadap kearifan lokal dalam penegakan ketertiban dan perlindungan masyarakat. | 1. Kearifan lokal mendukung ketertiban sosial.<br>2. Keterlibatan tokoh adat dalam forum keamanan masyarakat.<br>3. Tradisi gotong royong masih terjaga. | 1. Potensi konflik antara aturan formal dan norma adat.<br>2. Rendahnya koordinasi dengan lembaga adat.<br>3. Keterbatasan pemahaman anggota Satpol PP terhadap budaya lokal. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Masyarakat Rentan (anak jalanan, lansia, pengungsi bencana, keluarga miskin): kebutuhan perlindungan dari gangguan ketertiban dan akses layanan darurat. | 1. Program sosial pemerintah daerah.<br>2. Partisipasi LSM dan komunitas sosial.<br>3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kelompok rentan. | 1. Tingginya angka kemiskinan.<br>2. Terbatasnya shelter/pos perlindungan sementara.<br>3. Koordinasi lintas sektor masih terbatas. |
| 4 | Penyandang Disabilitas: aksesibilitas layanan Satpol PP & Damkar dalam evakuasi, darurat, dan pelayanan publik. | 1. Adanya kebijakan nasional & daerah tentang disabilitas.<br>2. Kesadaran publik terhadap inklusi semakin meningkat.<br>3. Dukungan teknologi untuk layanan inklusif. | 1. Fasilitas ramah disabilitas masih terbatas.<br>2. Rendahnya jumlah anggota Satpol PP terlatih dalam penanganan disabilitas.<br>3. Kurangnya anggaran khusus untuk program inklusif. |

| No. | Telaah KLHS terkait Tupoksi | Faktor Pendorong | Faktor Hambatan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, isu strategis pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja walaupun secara tidak langsung | 1.Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat<br>2.Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja<br>3.Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas<br>4.Penambahan sarana dan prasarana operasional | 1.Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan<br>2.Kualitas SDM yang belum seimbang dengan beban tugas<br>3.Belum ada kegiatan peningkatan kualias SDM<br>4.Terbatasnya Sarana penunjang kegiatan<br>5.Terbatasnya anggaran operasional |

Narasi : Berdasarkan hasil telaah, dapat disimpulkan bahwa:
1. Satpol PP & Damkar memiliki keterkaitan strategis dengan pembangunan berkelanjutan, baik melalui implikasi RTRW maupun KLHS.
2. Faktor pendorong utama adalah partisipasi masyarakat, dukungan regulasi, dan

komitmen peningkatan sarana prasarana.
3. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan sinkronisasi lintas sektor.
4. Misi SAE Sosial memperluas peran Satpol PP & Damkar menjadi lebih inklusif, dengan perhatian khusus pada kelompok perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan, dan penyandang disabilitas.
5. Dengan penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan dukungan anggaran, Satpol PP & Damkar dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025–2029 yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan lingkungan dan sosial.

2.7 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apa bila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkangan barang permasalahan dan factor penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

Meningkatkan pengawasan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran

Meningkatkan kerjasama antara lintas sektoral dalam menjaga dan menegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran.

Mengembangkan sistem perencanaan kegiatan penyelenggaraan menegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran.

Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personil yang profesional, diantaranya dengan mengoptimalkan pembinaan personil melalui pemahaman tugas dan fungsi secara periodic

Memberi pemahaman dan pengertian Peraturan Daerah kepada masyarakat

## TABEL 2.7 Teknik Menyimpulkan lsu Strateais PD

| NO | Potensi Daerah yang Mnejadi Kewenangan PD | Permasalahan PD | lsu KLHS Yang Relevan dengan PD | lsu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD | | | lsu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Global | Nasional | Regional | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jumlah personel Satpol PP & Damkar relatif cukup besar, didukung oleh peraturan daerah. | Kualitas SDM belum merata, sebagian belum sesuai kualifikasi tugas. | Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. | Tantangan profesionalisme aparat keamanan publik di era globalisasi. | Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur. | Secara regional, kualitas SDM Satpol PP dan Damkar di Jawa Timur, khususnya kawasan Tapal Kuda, masih belum merata. Terbatasnya lembaga pelatihan khusus dan rendahnya mobilitas tenaga antar kabupaten/kota menjadi hambatan peningkatan kapasitas. | Peningkatan kualitas SDM Satpol PP dan Damkar melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi. |
| 2 | Sarana prasarana dasar penanggulangan bencana dan kebakaran sudah tersedia. | Sarpras masih terbatas, belum seimbang dengan cakupan wilayah. | Efisiensi sumber daya dan optimalisasi sarana ramah lingkungan. | Perubahan iklim memicu peningkatan risiko kebakaran & bencana. | Program nasional mitigasi bencana & adaptasi perubahan iklim. | Kabupaten Probolinggo termasuk wilayah rawan bencana karena berada di lingkar Gunung Bromo, Semeru, serta kawasan pesisir utara. Namun, sarana prasarana pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat di tingkat regional (Tapal Kuda) belum seimbang dengan potensi ancaman. | Penguatan sarana prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran yang adaptif terhadap perubahan iklim. |
| 3 | Masyarakat masih memiliki budaya gotong royong dan kearifan lokal (misalnya komunitas adat Tengger). | Tingkat ketertiban masyarakat masih rendah, kesadaran hukum lemah. | Integrasi kearifan lokal dalam penegakan ketertiban dan perlindungan lingkungan. | Isu global inklusi sosial dan keberlanjutan pembangunan. | Program nasional pemberdayaan masyarakat rentan & inklusi sosial. | Di kawasan urban Tapal Kuda, masalah sosial seperti kriminalitas, konflik sosial, dan rendahnya kesadaran hukum masih menjadi isu regional yang relevan dengan tugas Satpol PP. Perbedaan norma adat dan aturan formal juga berpotensi menimbulkan gesekan. | Penguatan ketertiban umum berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. |
| 4 | Dukungan regulasi: Perda RTRW, Perda Tibumtranmas, serta misi SAE Sosial RPJMD. | Koordinasi lintas sektor masih lemah, penanganan bencana belum optimal. | Integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan melalui KLHS. | Agenda global SDGs (tujuan 11: kota dan permukiman berkelanjutan, tujuan 13: aksi iklim). | Agenda nasional RPJMN 2025–2029 tentang ketahanan sosial & lingkungan. | Secara regional, integrasi program penanggulangan bencana dan ketertiban lintas kabupaten/kota masih lemah. Koordinasi dalam kerangka Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jawa Timur perlu diperkuat agar sinergi penanganan kebencanaan dan ketertiban lebih optimal. | Penguatan koordinasi lintas sektor dan integrasi kebijakan Satpol PP dan Damkar dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah diukur sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang sesuai dengan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, dan Continously (SMART-C). Setiap sasaran memiliki indikator yang telah terukur dan terarah secara fokus agar pencapaiannya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2025 -2029, Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam Tujuan ke-5 yaitu ***"Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal"*** dengan Sasaran ke-2 yaitu ***"Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas".*** Berikut Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 -2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

| RPJMD | | | |
|---|---|---|---|
| VISI : Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing. (SAE) | | | |
| MISI 5: SAE SOSIAL : Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas. | | | |
| TUJUAN : Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal | | | |
| SASARAN : Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas | | | |
| RENSTRA | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas | Sasaran<br>1.Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | a. Penguatan peran Satpol PP dalam penegakan Perda/Perkada secara humanis dan berkeadilan.<br>b. OptFimalisasi patroli wilayah dan operasi yustisi berbasis zona rawan pelanggaran.<br>c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pelayanan aduan masyarakat. | a. Peningkatan operasi ketertiban umum (penertiban PKL, reklame, bangunan liar, dan kawasan terlarang RTRW).<br>b. Pengembangan sistem **aduan cepat** masyarakat berbasis aplikasi.<br>c. Sinergi lintas OPD, Polri, dan TNI dalam operasi gabungan penertiban.<br>d. Sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait ketertiban umum dan ketaatan Perda. |
| | 2.Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat | 1. Peningkatan operasi ketertiban umum (penertiban PKL, reklame, bangunan liar, dan kawasan terlarang RTRW).<br>2. Pengembangan sistem **aduan cepat** masyarakat berbasis aplikasi.<br>3. Sinergi lintas OPD, Polri, dan TNI dalam operasi gabungan penertiban.<br>4. Sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait ketertiban umum dan ketaatan | a. Pemberdayaan dan pelatihan Satlinmas dalam bidang mitigasi bencana Kebakaran, pertolongan pertama, dan keamanan lingkungan.<br>b. Penyediaan sarana pendukung operasional Satlinmas di tingkat desa/kelurahan.<br>c. Peningkatan koordinasi Satlinmas dengan BPBD, TNI/Polri, dan perangkat desa. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Perda. | d. Penguatan peran Satlinmas dalam mendukung kegiatan keagamaan, budaya, dan sosial kemasyarakatan. |
| | 3.Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.<br>b. Pengembangan sistem layanan pemadam kebakaran berbasis teknologi informasi.<br>c. Peningkatan sarana prasarana damkar, pos pantau, dan jaringan hydrant.<br>d. Pemberdayaan masyarakat melalui relawan damkar dan edukasi pencegahan kebakaran. | a. Penambahan armada dan pos damkar di wilayah strategis.<br>b. Penyusunan peta rawan kebakaran dan integrasi dengan RTRW.<br>c. Peningkatan pelatihan teknis damkar dan penyelamatan berbasis standar nasional.<br>d. Edukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran di sekolah, pasar, dan kawasan permukiman padat.<br>e. Pembentukan relawan damkar di tiap kecamatan. |
| | 4.Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | a. Penguatan sistem manajemen kinerja berbasis akuntabilitas dan transparansi.<br>b. Penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis digital.<br>c. Optimalisasi perencanaan, pelaporan, dan penganggaran berbasis kinerja. | a. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.<br>b. Penerapan sistem informasi manajemen kinerja dan keuangan berbasis digital.<br>c. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang tata kelola pemerintahan.<br>d. Optimalisasi pengawasan internal, evaluasi kinerja, dan tindak lanjut hasil pengawasan. |

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran dan gangguan sosial lainnya. Sejalan dengan Visi RPJMD Kabupaten Probolinggo *"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius,*

*dan Eksis Berdaya Saing (SAE)"*, serta Misi 5 *SAE Sosial : Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas*, Renstra ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan difokuskan pada empat sasaran utama, yaitu:

a) **Peningkatan penyelenggaraan Trantibumlinmas** dalam sub-urusan ketentraman dan ketertiban umum,
b) **Penguatan manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)** di desa/kelurahan dan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kabupaten
c) **Optimalisasi penyelenggaraan sub-urusan kebakaran** melalui peningkatan sarana, sistem, dan edukasi masyarakat, serta
d) **Penguatan akuntabilitas tata kelola perangkat daerah** yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja.

Dengan strategi yang terarah dan kebijakan yang implementatif, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban, memberikan perlindungan, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Pada akhirnya, upaya ini mendukung terwujudnya ketahanan sosial dan ketahanan daerah yang berlandaskan kesetaraan gender dan kearifan lokal sesuai amanat RPJMD 2025–2029.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN/TUJUAN | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PERHITUNGAN | SATUAN | Base line | TARGET KINERJA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas | | | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Mengukur Capaian dan Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar | IPT = (Wbencana X Ibencana) + (Wtrantibum X Itrantibum) + (Wsatlinmas X Isatlinmas) + (Wkebakaran X Ikebakaran) | INDEKS | 44.91 | 48.07 | 53.64 | 57.51 | 60.77 | 66.11 | 68.6 |
| | Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas | | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Mengukur Capaian dan Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar | IPT = (Wbencana X Ibencana) + (Wtrantibum X Itrantibum) + (Wsatlinmas X Isatlinmas) + (Wkebakaran X Ikebakaran) | INDEKS | 44.91 | 48.07 | 53.64 | 57.51 | 60.77 | 66.11 | 68.6 |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | menggambarkan tingkat capaian kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | $I_{PKKU} = \sum_{n}^{i} (WD^{i} \times WS_{n}^{i} \times S_{n}^{i})$ | INDEKS | 29.32 | 35.87 | 47.33 | 53.54 | 59.03 | 62.27 | 65.58 |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat | Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat | menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, membina, dan memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan | $IPM\ Satlinmas = \sum_{n}^{i} ((WD^{i} \times WV_{n}^{i} \times S_{n}^{i}) \div k)$ | INDEKS | 13.28 | 13.87 | 19.08 | 22.69 | 27.15 | 31.68 | 35.82 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | masyarakat di tingkat kelurahan/desa | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | menggambarkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan kebakaran serta penyelamatan non-kebakaran | IK 1 + IK2 + tK3 + IK4+ tK 5 + IK6 = Total Skor | INDEKS | 51 | 56 | 61 | 66 | 68 | 78 | 83 |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai hasil atas evalusi akuntabilitas kinerja SATPOL PP tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | Nilai SAKIP tahun n - Nilai SAKIP tahun n-1 _____ x 100 % Nilai SAKIP tahun n-1 | PERSEN | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 – 2029, Satpol PP Kabupaten Probolinggo berperan penting melalui Misi SAE Sosial, khususnya pada aspek pemberdayaan masyarakat rentan, termasuk perempuan, masyarakat adat, serta penyandang disabilitas.

Upaya tersebut dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis, antara lain:

1. Meningkatkan Ketahanan Daerah serta Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas.
   Hal ini diukur melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Target peningkatan dari angka 44,91 (tahun 2024) hingga mencapai 68,60 (tahun 2030) menunjukkan keseriusan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan melindungi seluruh warga, khususnya kelompok rentan.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban.
   Indeks kinerjanya ditargetkan naik dari 29,32 pada tahun 2024 menjadi 65,58 pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan semakin baiknya pelayanan perlindungan masyarakat, yang di dalamnya termasuk menjamin keamanan bagi perempuan, masyarakat adat, kelompok miskin, dan penyandang disabilitas.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
   Target indikator meningkat dari 13,28 di tahun 2024 menjadi 35,82 di tahun 2030. Hal ini menandakan penguatan kapasitas Satlinmas dalam melibatkan masyarakat, termasuk unsur rentan, agar berdaya dalam menjaga ketahanan sosial di lingkungannya.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Sub-Urusan Kebakaran.
   Indeks penyelenggaraan ditingkatkan dari 51 di tahun 2024 hingga mencapai 83 di tahun 2030. Upaya ini tidak hanya menjamin keselamatan masyarakat umum, tetapi juga memastikan kelompok rentan dan disabilitas memperoleh perlindungan yang sama dalam penanganan bencana kebakaran.
5. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah.
   Melalui kenaikan nilai LHE AKIP secara konsisten setiap tahun, Satpol PP menunjukkan komitmen untuk bekerja lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelayanan publik yang berkeadilan.

Seluruh capaian indikator tersebut menjadi wujud nyata dukungan Satpol PP terhadap Misi SAE Sosial. Dengan meningkatnya keamanan, ketertiban, serta perlindungan masyarakat, diharapkan kelompok perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan, dan penyandang disabilitas dapat hidup dengan lebih aman, bermartabat, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, peran Satpol PP bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penguat jaring sosial yang memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi, sehingga visi Kabupaten Probolinggo

yang SAE (Sejahtera, Amanah-Religius, dan Eksis Berdaya Saing) dapat tercapai secara berkelanjutan.

## 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.2.a PENENTUAN STRATEGI

Sub bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 tahun kedepan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tah

| No | Arah Kebijakan Renstra PD | Perspektif Masyarakat | Perspektif Proses Internal | Perspektif Kelembagaan | Perspektif Keuangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penegakan Perda/Perkada, patroli dan operasi yustisi, edukasi ketertiban umum | Rasa aman & nyaman masyarakat meningkat | Operasi ketertiban berbasis zona rawan & teknologi | Aparatur profesional dalam penegakan Perda | Efisiensi biaya operasi yustisi & patroli |
| 2 | Pemberdayaan & pelatihan Satlinmas, integrasi dengan ketahanan sosial & bencana | Satlinmas berdaya, masyarakat terlindungi | Proses pelibatan masyarakat lebih sistematis | Penguatan kapasitas kelembagaan Satlinmas | Alokasi anggaran lebih fokus pada desa/kelurahan prioritas |
| 3 | Penguatan sarpras damkar, layanan darurat digital, pembentukan relawan damkar, edukasi kebakaran | Respon cepat kebakaran, keselamatan masyarakat meningkat | Proses layanan darurat cepat & transparan | SDM Damkar bersertifikat, relawan terlatih | Efisiensi belanja sarpras, kemitraan CSR untuk hydrant/alat |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Peningkatan tata kelola, integritas & profesionalisme aparatur, sistem informasi kinerja | Kepercayaan masyarakat pada pelayanan publik meningkat | Proses kerja lebih transparan & berbasis IT | Reformasi birokrasi & budaya kerja adaptif | Efisiensi anggaran lewat digitalisasi & pengendalian kinerja |

un. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsung dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.a.

Mapping Strategi Renstra Satpol PP & Damkar Kabupaten Probolinggo 2025–2029

## 3.2.b. PENAHAPAN PEMBANGUNAN

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.b. Pentahapan Rencana Strategis PD

| TAHAPI **(2026)** | TAHAP II **(2027)** | TAHAP Ill **(2028)** | TAHAP IV **(2029)** | TAHAP V **(2030)** |
|---|---|---|---|---|
| **Penguatan**<br>Fokus: konsolidasi awal, penguatan kelembagaan, serta penerapan program prioritas bupati.<br>a) Pemetaan kebutuhan SDM, sarana, dan prasarana Satpol PP & Damkar.<br>Penguatan regulasi dan SOP penegakan Perda/Perkada.<br>b) Sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait ketertiban umum dan pencegahan kebakaran.<br>c) Peningkatan kapasitas awal personel Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas.<br>d) **Penerapan SAE LAYANAN (Mata Prabulinggih)** → | **Percepatan**<br>Fokus: percepatan layanan dan perluasan jangkauan.<br>a) Optimalisasi patroli, operasi ketertiban, dan penegakan Perda berbasis zona rawan.<br>b) Percepatan pembangunan pos damkar baru dan penambahan armada.<br>c) Peningkatan kapasitas Satlinmas melalui pelatihan terstruktur.<br>d) Kolaborasi lintas OPD dan stakeholder dalam operasi gabungan.<br>e) **Integrasi SAE LAYANAN dengan sistem respon cepat darurat & dashboard monitoring.**<br>**Penguatan SAE** | **Peningkatan**<br>Fokus: peningkatan kualitas layanan dan inovasi.<br>a) Pengembangan relawan damkar di tingkat kecamatan/kelurahan.<br>b) Peningkatan kualitas SDM dengan sertifikasi teknis damkar & penyelamatan.<br>c) Integrasi peran Satlinmas dengan program ketahanan sosial dan mitigasi Kebakaran.<br>d) **Pengembangan inovasi SAE LAYANAN** → aplikasi mobile, pelaporan berbasis geotagging, integrasi dengan | **Pencapaian Tujuan**<br>Fokus: pemantapan capaian sasaran Renstra.<br>a) Evaluasi capaian kinerja trantibum, damkar, dan Satlinmas.<br>b) Optimalisasi sarana-prasarana (hydrant, pos pantau, armada, sistem digital).<br>c) Pemantapan akuntabilitas tata kelola berbasis kinerja.<br>d) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan humanis.<br>e) **Pemantapan SAE LAYANAN** → platform utama pelayanan aduan Satpol PP & Damkar. | **Evaluasi**<br>Fokus: evaluasi menyeluruh dan persiapan Renstra berikutnya.<br>a) Review capaian Renstra 2025–2029 secara komprehensif.<br>b) Identifikasi *best practices* layanan digital & penertiban PAD.<br>c) Penyusunan strategi Renstra 2031–2035.<br>d) **Evaluasi SAE LAYANAN & SAE PENDAPATAN DAERAH** → perbaikan fitur, skema penegakan, dan kesinambungan program. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| implementasi sistem digital layanan aduan cepat Satpol PP & Damkar melalui *call center 112* bekerja sama dengan Dinas Kominfo.<br>e) **Penerapan SAE PENDAPATAN DAERAH (Intensifikasi & Ekstensifikasi PAD)**:<br>Penertiban reklame/iklan tak berizin.<br>Penertiban bangunan/tempat usaha tanpa izin.<br>Penindakan tempat usaha yang belum membayar pajak/retribusi. | **PENDAPATAN DAERAH melalui pengawasan dan monitoring usaha** (hotel, restoran, hiburan, PKL) untuk memastikan kepatuhan pajak/retribusi. | Command Center.<br>**Edukasi & sosialisasi PAD** → sosialisasi ke PKL, pedagang pasar, UMKM terkait izin usaha dan kewajiban retribusi/pajak. | **Penataan PKL dalam zona resmi perda** serta pembinaan agar masuk sistem retribusi daerah. | |

### 3.2.c. LOCUS SATPOL PP KABUPATEN PROBOLINGGO

**I.** Peningkatan Penyelenggaraan Trantibumlinmas dalam Sub-urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) **Locus Wilayah:**
   1. Kawasan pusat pelayanan publik (kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, terminal, pasar tradisional dan modern).
   2. Kawasan strategis ekonomi (pusat perdagangan, pariwisata, dan kawasan industri).
   3. Wilayah rawan konflik sosial, kriminalitas, serta pelanggaran Perda/Perkada.

b) **Fokus Intervensi:**
   1. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.
   2. Patroli dan pengawasan rutin untuk pencegahan gangguan Trantibum.
   3. Edukasi kesadaran hukum dan disiplin masyarakat.

**II.** Penguatan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa/Kelurahan serta Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kabupaten

a) **Locus Wilayah:**
   1. Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Probolinggo dengan prioritas desa rawan bencana, desa wisata, dan desa padat penduduk.
   2. Tingkat Kabupaten (pembentukan Satgas Linmas sebagai *quick response team*).

b) **Fokus Intervensi:**
   1. Peningkatan kapasitas Linmas melalui pelatihan bela negara, penanganan konflik sosial, dan mitigasi bencana.
   2. Penguatan kelembagaan Linmas dengan sistem komando yang jelas.

Integrasi peran Linmas dalam mendukung ketahanan sosial dan pemberdayaan masyarakat rentan/disabilitas.

**III.** Optimalisasi Penyelenggaraan Sub-urusan Kebakaran melalui Peningkatan Sarana, Sistem, dan Edukasi Masyarakat

a) **Locus Wilayah:**
   1. Kawasan padat penduduk dan permukiman kumuh (rawan kebakaran).
   2. Kawasan industri, pasar, dan pusat perbelanjaan.
   3. Area pariwisata dan kawasan hutan/pertanian yang rawan kebakaran lahan.

b) **Fokus Intervensi:**
   1. Modernisasi sarana dan prasarana Damkar (armada, pos jaga, peralatan).
   2. Sistem deteksi dini dan sistem informasi kebakaran berbasis teknologi.

Edukasi dan simulasi penanggulangan kebakaran pada sekolah, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha.

**IV.** Penguatan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah yang Profesional, Transparan, dan Berbasis Kinerja

a) **Locus Wilayah:**
   1. Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
   2. Jejaring koordinasi lintas perangkat daerah, aparat keamanan (TNI/POLRI), dan masyarakat.

b) **Fokus Intervensi:**
   1. Penguatan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbasis kinerja.
   2. Penerapan digitalisasi administrasi dan layanan Satpol PP (e-Satpol PP).
   3. Transparansi laporan kinerja (LAKIP, LPPD, SAKIP) yang partisipatif dan mudah diakses publik.

Dengan locus ini, arah intervensi Satpol PP 2025–2029 akan lebih fokus mendukung **Tujuan RPJMD ke-5** yaitu *Ketahanan Sosial dan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal* serta Sasaran **Pemberdayaan masyarakat rentan dan disabilitas.**

### 3.2.d. Arah Kebijakan Renstra Satpol PP Kab. Probolinggo 2025–2029

#### 1. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Penegakan Perda/Perkada secara humanis, adil, dan profesional.
b) Peningkatan kualitas pelayanan ketertiban umum berbasis **teknologi informasi**.
c) Pengendalian pemanfaatan ruang publik sesuai RTRW.
d) Penyelenggaraan operasi ketertiban terpadu lintas OPD, Polri, dan TNI.
e) Edukasi dan sosialisasi ketertiban umum berbasis partisipasi masyarakat.

#### 2. Bidang Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

a) Penguatan kapasitas Satlinmas desa/kelurahan dalam penanggulangan bencana, keamanan lingkungan, dan kegiatan sosial.
b) Optimalisasi peran Satlinmas pada kegiatan keagamaan, budaya, dan sosial kemasyarakatan.
c) Penyediaan sarana operasional Satlinmas yang memadai.
d) Integrasi Satlinmas dengan program ketahanan sosial berbasis kearifan lokal.

#### 3. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

a) Peningkatan sarana-prasarana pemadam kebakaran (armada, pos pantau, hydrant, alat penyelamatan).
b) Pengembangan sistem layanan darurat kebakaran dan penyelamatan berbasis digital.
c) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi teknis SDM Damkar.
d) Pembentukan dan pemberdayaan **relawan damkar** di kecamatan/kelurahan.
e) Edukasi pencegahan kebakaran pada sekolah, pasar, kawasan padat penduduk, dan kawasan industri.

#### 4. Bidang Tata Kelola Perangkat Daerah

a) Penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.
b) Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja Satpol PP & Damkar.
c) Penguatan integritas dan profesionalisme aparatur.
d) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kinerja dan layanan publik.

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD Satpol PP
Kabupaten Probolinggo 2025–2029

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai NSPK Trantibumlinmas | Peningkatan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat | - Penegakan Perda/Perkada secara humanis dan profesional<br>- Optimalisasi patroli dan operasi yustisi berbasis zona rawan<br>- Sosialisasi dan edukasi ketertiban umum | Sub Urusan Trantibum |
| 2 | Penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Satlinmas) sesuai NSPK | Pemberdayaan masyarakat rentan dan peningkatan ketahanan sosial | - Pemberdayaan dan pelatihan Satlinmas<br>- Integrasi Satlinmas dengan program ketahanan sosial & bencana<br>- Penyediaan sarana operasional Satlinmas | Sub Urusan Perlindungan Masyarakat |
| 3 | Penanggulangan kebakaran & penyelamatan sesuai NSPK | Peningkatan kualitas layanan publik, keselamatan masyarakat, dan pengurangan risiko kebakaran | - Penguatan sarpras damkar (armada, pos, hydrant)<br>- Penerapan layanan darurat berbasis digital<br>- Pembentukan relawan damkar di kecamatan/kelurahan<br>- Edukasi pencegahan kebakaran | Sub Urusan Kebakaran |
| 4 | Tata kelola perangkat daerah sesuai NSPK SAKIP & Reformasi Birokrasi | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel | - Peningkatan kualitas perencanaan & pelaporan kinerja<br>- Pemanfaatan sistem informasi kinerja & keuangan digital<br>- Penguatan integritas & profesionalisme aparatur | Bidang Tata Kelola PD |

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program Adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah pro gram dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indicator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

## 4.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja

Matriks Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta indikator kinerjanya merupakan bagian integral dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan matriks ini dilakukan untuk menjamin keterpaduan antara visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan di perangkat daerah. Dengan demikian, matriks ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengukur kinerja pembangunan daerah.

Secara konseptual, matriks dirancang untuk menunjukkan keterkaitan antara **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)** dengan sasaran RPJMD yang relevan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki dasar hukum, arah kebijakan, dan legitimasi perencanaan yang jelas. Tujuan dan sasaran pembangunan kemudian dijabarkan ke dalam outcome yang diharapkan serta output yang terukur. Outcome merepresentasikan hasil jangka menengah yang mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran, sedangkan output menjadi wujud nyata pelaksanaan kegiatan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Indikator kinerja yang melekat pada setiap program/kegiatan/subkegiatan berfungsi sebagai alat ukur yang obyektif untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan. Dengan indikator tersebut, perangkat daerah memiliki tolok ukur yang jelas dalam mengevaluasi capaian, melakukan pengendalian, serta menyusun strategi perbaikan berkelanjutan. Di sisi lain, keberadaan indikator ini juga memperkuat prinsip **akuntabilitas** dan **transparansi** dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui perumusan matriks ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, konsisten dengan sasaran pembangunan jangka menengah, serta adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Selain itu, matriks ini juga menjadi pedoman operasional sekaligus instrumen evaluasi kinerja yang memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah dilakukan secara lebih sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

TABEL 4.2

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN FORMULA PERHITUNGAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja** | | | | | | | |
| - Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat | | | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai) | | |
| | | | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (% | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | (Jumlah Perda/Perkada ditegakkan ÷ Jumlah Perda/Perkada kewenangan) × 100% |
| | | | | | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase) | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | (Jumlah kegiatan terlaksana ÷ Jumlah kegiatan direncanakan) × 100% |
| | | | | | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat= (Jumlah desa/kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif : Jumlah total desa/kelurahan) ×100% |
| | | | | | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | (Nilai Kelembagaan+ Nilai Kemitraan+ Nilai SDM+Nilai Akuntabilitas+ Nilai Pengembangan K |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | apasitas / (dibagi) 5 |
| | | | | | Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | (Jumlah sasaran menerima informasi ÷ Jumlah total sasaran) × 100% |
| | | | | Jumlah peningkatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas ((pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pengawalan (laporan) | | Pengamanan, dan Pengawalan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit) |
| | | | | | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang) | 1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja(pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang) | 1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) | 1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) | 1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) | 1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) | 1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit) | 1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) |
| | | | | | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang) | 1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (pada tahun n) |
| | | | | Jumlah Peningkatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan) | 1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen) | 1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ((pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit) | 1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan) | 1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) | 1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |
| | | | | Jumlah Peningkatan PPNS yang Dibina dan/atau Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen) | 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan) | 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) | 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (pada tahun n) |
| | | | | | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen) | 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (pada tahun n) |
| | | | | | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen) | 1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen) | 1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan) | 1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) | 1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (pada tahun n) |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat | | | Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (% | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase) | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Jumlah peningkatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota(pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen) |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit) |
| | | | | | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang) | 1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang) | 1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang) |
| | | | | | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) | 1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) | 1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) | 1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) | 1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit) | 1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang) | 1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (pada tahun n) |
| | | | | Jumlah Peningkatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit) | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan) | 1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen) | 1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ( dokumen) |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit) | 1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan) | 1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) | 1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n) |
| | | | | Jumlah Peningkatan PPNS yang Dibina dan/atau Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen) | 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan) | 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) | 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (pada tahun n) |
| | | | | | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen) | 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (pada tahun n) |
| | | | | | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen) | 1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen) | 1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan) | 1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) | 1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (pada tahun n) |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Nilai) | | |
| | | | Meningkatnya Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran | | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) | 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) |
| | | | | | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) | 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) |
| | | | | | Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran (%) | 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran (%) |
| | | | | Persentase keberhasilan penanganan kejadian kebakaran dan insiden bahan berbahaya dan beracun (B3) secara cepat dan tepat oleh petugas pemadam kebakaran dalam waktu tanggap maksimal | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) | 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15 menit sejak laporan diterima | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) | 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) | 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen) | 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) | 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang) | 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pejabat fungsiona Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) | 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) | 1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulang an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | 1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) | 1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) | 1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) | 1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) | 1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | 1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 1.05.04.2.01.0022 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen) | 1.05.04.2.01.0023 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang) | 1.05.04.2.01.0024 - Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran | Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (pada tahun n) |
| | | | | Jumlah Peningkatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) | 1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) |
| | | | | | Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan) | 1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) | 1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan) | 1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (pada tahun n) |
| | | | | Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelatihan Mitigasi Kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) | 1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) | 1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) | 1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang) | 1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) | 1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) | 1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) | 1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang) | 1.05.04.2.04.0004 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran | Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (pada tahun n) |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pengangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Terselesaikannya dokumen perencanaan & pelaporan sesuai dengan SOP | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ((pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ((pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ((pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ((pada tahun n) |
| | | | | Terselesaikannya administrasi keuangan sesuai SOP | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) |
| | | | | Terselesainya dokumen administrasi kepegawaian sesuai SOP | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ((pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (pada tahun n) |
| | | | | Terselesaikannya dokumen administrasi umum sesuai SOP | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ((pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ((pada tahun n) |
| | | | | Terselesaikannya dokumen administrasi pengadaan BMD sesuai SOP | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan ((pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan ((pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (UnPit) | 1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (pada tahun n) |
| | | | | Terselesaikannya dokumen penyediaan jasa penunjang sesuai SOP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (pada tahun n)) |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ((pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (pada tahun n)) |
| | | | | Terlaksankannya pemeliharaan BMD sesuai kebutuhan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ((pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (pada tahun n)) |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (pada tahun n) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (pada tahun n) |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (pada tahun n) |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)L* | *(05)* | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (pada tahun n) |

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN
PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | INDIKATOR | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | Hapus kolom | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 27.763.718.014 | | 28.072.408.216 | | 28.490.782.068 | | 29.072.175.179 | | 29.753.870.716 | | |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 76,96 | 77,27 | 16.678.452.714 | 77,42 | 16.863.808.216 | 77,57 | 17.115.082.068 | 77,72 | 17.464.275.179 | 77,88 | 17.873.770.716 | 1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas | | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | |
| 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 8 | 8 | 15.000.000 | 8 | 15.000.000 | 8 | 15.000.000 | 8 | 15.000.000 | 8 | 15.000.000 | | |
| 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 8 | 13 | 6.000.000 | 13 | 6.000.000 | 13 | 10.000.000 | 13 | 15.000.000 | 13 | 20.000.000 | | |
| 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 10.809.208.669,82 | | 10.760.522.216 | | 10.548.746.268 | | 10.511.736.979 | | 10.410.719.804 | | |
| Terselesaikannya administrasi keuangan sesuai SOP | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 100 | 95 | 10.809.208.669,82 | 94 | 10.760.522.216 | 94 | 10.548.746.268 | 94 | 10.511.736.979 | 94 | 10.410.719.804 | | |
| 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 10.809.208.669,82 | | 10.760.522.216 | | 10.548.746.268 | | 10.511.736.979 | | 10.410.719.804 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 100 | 95 | 10.809.208.669,82 | 94 | 10.760.522.216 | 94 | 10.548.746.268 | 94 | 10.511.736.979 | 94 | 10.410.719.804 | | |
| 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 20.000.000 | | 40.000.000 | | 330.000.000 | | 340.000.000 | | 400.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 10.000.000 | | 20.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 100 | 9 | 10.000.000 | 18 | 20.000.000 | 247 | 300.000.000 | 247 | 300.000.000 | 247 | 350.000.000 | | |
| 1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 10.000.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 1 | 1 | 10.000.000 | 2 | 20.000.000 | 3 | 30.000.000 | 4 | 40.000.000 | 5 | 50.000.000 | | |
| 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | |
| Terselesaikannya dokumen administrasi umum sesuai SOP | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 50 | 10 | 180.000.000 | 10 | 180.000.000 | 10 | 180.000.000 | 10 | 180.000.000 | 10 | 180.000.000 | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 11 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 11 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | | |
| 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 50 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | | |
| 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 40.000.000 | | 107.286.000 | | 266.335.800 | | 632.538.200 | | 1.073.050.912 | | |
| 1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 0 | | 0 | | 166.335.800 | | 502.538.200 | | 923.050.912 | | |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166.335.800 | 3 | 502.538.200 | 4 | 923.050.912 | | |
| 1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 10.000.000 | | 50.000.000 | | 30.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7 | 2 | 10.000.000 | 10 | 50.000.000 | 6 | 30.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | | |
| 1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 30.000.000 | | 57.286.000 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 100.000.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 6 | 2 | 30.000.000 | 3 | 57.286.000 | 4 | 70.000.000 | 5 | 80.000.000 | 6 | 100.000.000 | | |
| 1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 5.345.000.000 | | 5.350.000.000 | | 5.360.000.000 | | 5.365.000.000 | | 5.370.000.000 | | |
| Terselesaikannya dokumen penyediaan jasa penunjang sesuai SOP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 5.345.000.000 | 12 | 5.350.000.000 | 12 | 5.360.000.000 | 12 | 5.365.000.000 | 12 | 5.370.000.000 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 45.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 45.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 70.000.000 | | |
| 1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 5.300.000.000 | | 5.300.000.000 | | 5.300.000.000 | | 5.300.000.000 | | 5.300.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 5.300.000.000 | 12 | 5.300.000.000 | 12 | 5.300.000.000 | 12 | 5.300.000.000 | 12 | 5.300.000.000 | | |
| 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 263.244.045 | | 405.000.000 | | 405.000.000 | | 405.000.000 | | 405.000.000 | | |
| 1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | 5 | 80.000.000 | 5 | 80.000.000 | 5 | 80.000.000 | 5 | 80.000.000 | 5 | 80.000.000 | | |
| 1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 26 | 15 | 95.000.000 | 15 | 95.000.000 | 15 | 95.000.000 | 15 | 95.000.000 | 15 | 95.000.000 | | |
| 1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 30 | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | | |
| 1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 58.244.045 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 3 | 58.244.045 | 3 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 6 | 200.000.000 | | |
| 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 8.548.050.600 | | 8.643.100.000 | | 8.771.900.000 | | 8.950.900.000 | | 9.160.800.000 | | |
| Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | 100 | 8.548.050.600 | 100 | 8.643.100.000 | 100 | 8.771.900.000 | 100 | 8.950.900.000 | 100 | 9.160.800.000 | 1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) | 52,63 | 57,98 | | 60,52 | | 64,85 | | 68,15 | | 70,65 | | | |
| | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.544.050.600 | | 1.707.385.989 | | 1.950.015.854 | | 2.065.000.000 | | 2.165.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | 75.756.125 | | 186.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 0 | 1 | 75.756.125 | 100 | 186.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) | 0 | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen) | 0 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 85.015.854 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang) | 0 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 11 | 85.015.854 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang) | 0 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) | 0 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 120 | 100.000.000 | 120 | 100.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) | 100 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) | 0 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) | 0 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | 283.294.475 | | 326.385.989 | | 400.000.000 | | 500.000.000 | | 600.000.000 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit) | 0 | 7 | 283.294.475 | 1 | 326.385.989 | 1 | 400.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 600.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen) | 0 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen) | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | | |
| 1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang) | 0 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | | |
| 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | | 6.896.000.000 | | 6.817.714.011 | | 6.699.884.146 | | 6.739.900.000 | | 6.825.800.000 | | |
| 1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan) | 0 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | | |
| 1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen) | 0 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | | |
| 1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | | | | 5.000.000.000 | | 4.797.714.011 | | 4.579.884.146 | | 4.619.900.000 | | 4.705.800.000 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit) | 57 | 20 | 5.000.000.000 | 20 | 4.797.714.011 | 20 | 4.579.884.146 | 20 | 4.619.900.000 | 20 | 4.705.800.000 | | |
| 1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 76.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 0 | 7 | 76.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | | |
| 1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | | | | 200.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan) | 0 | 8 | 200.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | | |
| 1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 6 | 7 | 500.000.000 | 7 | 500.000.000 | 7 | 600.000.000 | 7 | 600.000.000 | 7 | 600.000.000 | | |
| 1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | |
| Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) | 32 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | | |
| 1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 2 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | | |
| 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | 108.000.000 | | 118.000.000 | | 122.000.000 | | 146.000.000 | | 170.000.000 | | |
| 1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS | | | | 10.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terbentuknya Sekretariat PPNS | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen) | 0 | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen) | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | | |
| 1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | 62.000.000 | | 66.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan) | 1 | 2 | 58.000.000 | 2 | 58.000.000 | 2 | 62.000.000 | 2 | 66.000.000 | 2 | 70.000.000 | | |
| 1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan) | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | | |
| 1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | 20.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 60.000.000 | | 80.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) | 0 | 2 | 20.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 40.000.000 | 4 | 60.000.000 | 6 | 80.000.000 | | |
| 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | 2.537.214.700 | | 2.565.500.000 | | 2.603.800.000 | | 2.657.000.000 | | 2.719.300.000 | | |
| Meningkatnya Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran (%) | 100 | 100 | 2.537.214.700 | 100 | 2.565.500.000 | 100 | 2.603.800.000 | 100 | 2.657.000.000 | 100 | 2.719.300.000 | 1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 380.000.000 | | 460.000.000 | | 430.000.000 | | 440.000.000 | | 500.000.000 | | |
| 1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 40 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | | |
| 1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | 20 | 60 | 50.000.000 | 60 | 50.000.000 | 60 | 50.000.000 | 60 | 50.000.000 | 60 | 50.000.000 | | |
| 1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) | 0 | 2 | 20.000.000 | 3 | 30.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | |
| 1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 90.000.000 | |
| Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) | 0 | 5 | 50.000.000 | 6 | 60.000.000 | 7 | 70.000.000 | 8 | 80.000.000 | 9 | 90.000.000 | |
| 1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) | 0 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | |
| 1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | 10.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | 0 | 3 | 10.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | | |
| 1.05.04.2.01.0022 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.05.04.2.01.0023 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | | | 0 | | 50.000.000 | | 0 | | 0 | | 50.000.000 | | |
| Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | | |
| 1.05.04.2.01.0024 - Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran | Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang) | 0 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | | |
| 1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | | 20.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| 1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | 10.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) | 0 | 10 | 10.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | | |
| 1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | 10.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan) | 0 | 10 | 10.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | 2.137.214.700 | | 2.065.500.000 | | 2.133.800.000 | | 2.177.000.000 | | 2.179.300.000 | | |
| 1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | 2.037.214.700 | | 1.890.500.000 | | 1.958.800.000 | | 2.002.000.000 | | 2.004.300.000 | | |
| Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) | 1.000 | 1.000 | 2.037.214.700 | 1.000 | 1.890.500.000 | 1.000 | 1.958.800.000 | 1.000 | 2.002.000.000 | 1.000 | 2.004.300.000 | | |
| 1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) | 0 | 20 | 50.000.000 | 25 | 75.000.000 | 25 | 75.000.000 | 25 | 75.000.000 | 25 | 75.000.000 | | |
| 1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) | 0 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | | |
| 1.05.04.2.04.0004 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran | | | | 0 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran | Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang) | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | | |

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo untuk lima tahun kedepan. Penetapan indicator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

TABEL 4.5

INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR SATPOL PP

KABUPATEN PROBOLINGGO

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| **1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja** | | | | | | | | | | |
| **I** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas | Indeks | 44,91 | 48,09 | 53,64 | 57,52 | 60,78 | 65,36 | 68,61 | |
| **II** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | Indeks | 7,33 | 8,97 | 11,83 | 13,39 | 14,76 | 15,57 | 16,4 | |
| 2 | Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat | Indeks | 3,32 | 3,47 | 4,77 | 5,67 | 6,79 | 7,92 | 8,96 | |
| 3 | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | Indes | 12,75 | 14 | 15,25 | 16,5 | 17 | 19,5 | 20,75 | |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persen | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |

TABEL 4.6

INDIKATOR KINERJA KUNCI

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Baseline 2024 | | SATUAN | BASE LINE 2024 | Target Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | |
| 5. | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (100) | | PERSEN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (52,63) | | PERSEN | 52.63 | 54.37 | 57.98 | 60.52 | 64.85 | 68.15 | 70.65 |
| | | 6).Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (100) | | PERSEN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7).Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (13) | | MENIT | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

**Tabel 4.7**

**Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUT COME | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | a. SAE LAYANAN<br>(Mata Prabulinggih) | | | |
| | Aktivitas Pendukung | Layanan Call Center Kebakaran | Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Aktivitas Pendukung | Layanan Data Kebakaran dan Evakuasi Non Kebakaran | - Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota<br>- Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | - |
| | b. SAE PENDAPATAN DAERAH<br>c. (INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAD) | | | |
| | Aktivitas Pendukung | Pelaksanaan Menertibkan kegiatan usaha atau individu yang tidak taat aturan, khususnya yang berpotensi menyumbang PAD antara lain :<br><br>a. Penertiban reklame/baliho/iklan tak berizin.<br>b. Penertiban bangunan atau tempat usaha tanpa IMB atau izin usaha.<br>c. Menindak tempat hiburan malam, restoran, hotel, dan usaha lain yang belum | Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | membayar pajak daerah. | | |
| | Aktivitas Pendukung | Pengawasan dan Monitoring Tempat Usaha Memastikan setiap kegiatan usaha berizin dan berkontribusi pada PAD sesuai ketentuan antara lain :<br><br>d. Pengawasan terhadap restoran, tempat hiburan dan hotel apakah sudah membayar pajak/restibusi.<br>e. Mengecek masa berlaku izin usaha (SIUP, TDUP, dll).<br>f. Menyisir pelaku usaha informal yang berpotensi menjadi objek retribusi atau pajak. | Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | |
| | Aktivitas Pendukung | Edukasi dan Sosialisasi Membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha agar berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak/retribusi antara lain :<br><br>g. Sosialisasi ke pedagang pasar, PKL, pelaku UMKM soal pentingnya izin usaha dan kontribusi PAD. | Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | |
| | Aktivitas Pendukung | Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Menata PKL agar masuk ke dalam sistem resmi yang dapat dikenakan retribusi daerah antara lain :<br><br>h. Penataan PKL agar masuk dalam zona yang ditentukan oleh perda.<br>Pembinaan agar PKL memiliki izin dan membayar retribusi. | Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | |
| 5 | Tindak Lanjut Dukungan Terhadap Prioritas Nasional : | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (Lihat Permendagri No. 10 Tahun 2025, Tabel B-3) | | |

# BAB V
# PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya kami telah selesai menyusun dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Probolinggo periode Tahun 2025 - 2029. Dokumen perencanaan strategis yang disusun lingkup Satpol PP Kabupaten Probolinggo ini merupakan pengejawatan lebih lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada visi dan misi daerah Kabupaten Probolinggo dalam masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2025 - 2029. Bagian penting dari dokumen perencanaan strategis ini adalah rencana program dan kegiatal serta kerangka pendanaan indikatif Satpol PP Kabupaten Probolinggo yang diproyeksikan untuk 5 (lima) tahun mendatang periode Tahun 2025-2029. Setiap rencana program dan kegiatan yang dicanangkan tidak lepas dari indikator kinerja pada setiap Program (outcome) dan Kegiatan (output) sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Dalam hal pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Probolinggo tercapai berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah dalam dokumen perencanan strategisnya, tentunya hal itu dapat dikatakan merupakan keberhasilan Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Semoga penyusunan dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Probolinggo ini dapat dijadikan barometer upaya peningkatan pelayanan Satpol PP Kabupaten Probolinggo selama periode Tahun 2025 - 2029 baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun terhadap masyarakat. Mudah-mudahan dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Probolinggo ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan bagi pihak pihak yang memerlukalnya, tentunya untuk penyempurnaan substansi dokumen perencanaan ini kami perlukan agar pada masa-masa yang akan datang kualitas maupun kuantitas penyajian dokumen ini dapat lebih baik.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan

Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komit menpimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 -2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Probolinggo

## 5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pelaksanaan Renstra ini berpedoman pada:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo, sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah.
3. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah.
4. Prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kaidah pelaksanaan ini dimaksudkan agar seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang tertuang dalam Renstra dapat dijalankan secara konsisten, terarah, terpadu, serta mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Probolinggo.

5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Agar implementasi Renstra dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi secara berkala.

1. Pengendalian dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo melalui monitoring rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pengendalian ini

dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap rencana kinerja tahunan, serta melakukan tindakan korektif apabila terdapat deviasi atau hambatan.

2. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun anggaran melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan pada akhir periode Renstra dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai ketercapaian sasaran strategis. Evaluasi ini mencakup efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, serta dampak dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, penajaman target kinerja, serta penyesuaian strategi pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, Renstra Satpol PP Kabupaten Probolinggo dapat terus adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Probolinggo, Juli 2025

# RENCANA STRATEGIS
# DINAS SOSIAL
# 2025-2029

www.dinsos.probolinggokab.go.id

dinsos@probolinggokab.go.id

Jln. A.Yani No. 23 Mangunharjo

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telahmemberi rahmat serta karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan tepat waktu. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, hal ini sesuai yang diisyaratkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa semua Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra (Rencana Strategis). Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan serta ide gagasan dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas Soisal Kabupaten Probolinggo ini. Dokumen Renstra 2025-2029 Dinas Sosial dapat menjadi dasar di dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

PROBOLINGGO, 29 September 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**RACHMAD HIDAYANTO,S.Sos,M.Si**
**Pembina Utama Muda**
**NIP.197309171996021001**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1. Latar belakang

Rencana pembangunan baik pada tingkat nasional, provinsi maupun daerah, terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan yang harus saling berkaitan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen rencana pembangunan daerah juga harus mengacu pada rencana pembangunan daerah di atasnya, baik dokumen rencana pembangunan di provinsi maupun nasional. Keterkaitan dokumen perencanaan ini dimaksudkan agar pembangunan seluruh daerah terpadu dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang, disusun kurun waktu tertentu sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan pemerintah, harus selaras dengan rencana anggaran, sehingga dapat dipastikan apa yang telah direncanakan dapat terealisasi karena didukung oleh anggaran yang memadai.

Rencana pembangunan daerah lima tahun disiapkan sebagai informasi kepada publik, tentang komitmen politik kepala daerah setempat yang dipilih dalam pilihan kepala daerah dalam kurun waktu masa baktinya. Rencana pembangunan ini diuraikan setiap lima tahun dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan pandangan, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, termasuk program dari peralatan lokal yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pengembangan regional, keuangan lokal, dan indikasi kerangka pendanaan lima tahun. Seiring dengan pemilihan kepala daerah atau disebut Bupati bersama Wakil Bupati dalam lingkup kabupaten, dilakukan secara simultan di semua wilayah otonom Indonesia pada tahun 2024.

Bupati dan Wakil Bupati dipilih untuk periode dari tahun 2025 hingga

2029, menuangkan rancangan RPJMD baru untuk periode tersebut yang memuat visi, misi, dan komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Probolinggo yaitu adalah **dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris)** dan **Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi)**. Pada tahun 2017, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86, yang mengatur termasuk tata cara untuk perencanaan, manajemen dan penilaian pembangunan regional, dan tata cara untuk menilai rencana peraturan daerah dan evaluasi pembangunan jangka panjang. Peraturan Mendagri tersebut, secara teknis dijabarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini mengamanatkan sejumlah perubahan-perubahan teknis yaitu: Penyusunan RPJMD 2025–2029 wajib s**elaras dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)**, **mengacu pada RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029**, dan **mempertimbangkan semangat otonomi daerah**, potensi lokal, serta **kearifan lokal**. Langkah ini bertujuan agar setiap daerah dapat merancang kebijakan pembangunan yang inklusif, kontekstual, serta berkelanjutan, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional.

Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan seperti perbedaan struktur bab dalam dokumen perencanaan daerah (Dokrenda) dan adanya proyeksi hingga tahun 2030 untuk mengakomodasi masa transisi kepala daerah dan persiapan penyusunan RKPD tahun 2030, mengisyaratkan bahwa kesiapan substansi, pemahaman konteks, dan sinergi antar pihak sangat dibutuhkan agar dokumen perencanaan tidak sebatas taat pedoman dan aturan, namun harus relevan terhadap kondisi dan perkembangan, partisipatif dan berdaya guna.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 pada periode yang bersangkutan, yaitu tahap pertama (2025-2029). RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 juga harus mengacu pada kebijakan RPJMN dan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Selain itu, pada tingkat kabupaten, RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-

2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Probolinggo. RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 telah diselerasakan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo diharapkan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati bisa terakomodir oleh program,kegiatan dan sub kegiatan.

**2. Landasan hukum**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan dokumen RENSTRA DINAS SOSIAL Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868)
11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 77);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D));

39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E)
41. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah ((RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;
42. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## 3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan rancangan dokumen rencana pembangunan 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2029, yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Probolinggo urusan Sosial pada periode tersebut.

Sementara itu tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah:

a. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2025-2029 menjadi sasaran, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan serta indikator kinerja

pembangunan urusan sosial pada tahun 2025-2029.

b. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap Tahunnya.

**4. Sistematika penyusunan**

Berdasarkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika Renstra Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang; landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STARTEGIS DINAS SOSIAL**

Bab ini menguraikan tentang Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi PD; Sumber Daya PD; Kinerja Pelayanan PD; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD; Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD; Penentuan Isu – Isu Strategis

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD ; serta Strategi dan Arah Kebijakan.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Secara umum, dalam bab ini diuraikan Matrik Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja; Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, Target, dan Pendanaan Indikatif; Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat Kaidah Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

### a. Tugas,fungsi,dan struktur organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati No 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas urusan dibidang sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo meyelenggaraan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang sosial
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial
c. Pelaksanaan,evaluasi dan pelaporan di bidang sosial
d. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial
e. Pembinaan terhadap UPT dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Sosial
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Susunan organisasi Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Bupati No 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat,membawahi:
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

f. Kelompok Jabatan Fungsional;serta
g. UPT

**a. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas**

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membatu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Serta Kepala Dinas sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang sosial
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial
3. Pelaksanaan,evaluasi dan pelaporan di bidang sosial
4. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial
5. Pembinaan terhadap UPT dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Sosial,serta
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

**b. Tugas dan Fungsi Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,serta penyusunan programmlaporan. Serta Sekretaris Dinas Sosial mempunyai fugsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
2. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan
4. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
5. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;

6. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
7. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;serta
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**c. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumberdaya manusia. Serta fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

1. pelaksanaan urusan administrasi umum
2. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah
3. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
4. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaana administrasi kepegawaian dan peningkatan sumberdaya manusia;
5. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
6. penyiapan bahan data kelembagaan, Analisa jabatan dan tatalaksana;serta
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**d. Tugas dan fungsi Kelompk jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
5. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
6. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;serta
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan koordinasi kegiatan serta pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perencanaan kerja dibidang pemberdayaan sosial;
2. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan Sosial sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. pelaksanaan koordinasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan dibidang pemberdayaan sosial meliputi Lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pusat kesejahteraan sosial sistem layanan rujukan terpadu (Puskesos SLRT),

pemberian rekomendasi perizinan usaha kesejahteraan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. pelaksanaan koordinasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan bantuan sosial UEP;
5. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pemberdayaan sosial;
6. pelaksanaan pengaturan distribusi atas permintaan tanah pemakaman pada makam milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;serta
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**f. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan koordinasi kegiatan serta pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perencanaan kerja dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
2. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pelaksanaan koordinasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi pelaksanaan rekomendasi dibidang sosial, fasilitasi bantuan sosial dan jaminan sosial, pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, resos anak berhadapan dengan hukum, resos anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan social lanjut usia, bimbingan lanjut,

aksebilitas sosial lanjut usia, pelayanan dan resos gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemsyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan resos penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis;

4. pelaksanaan dan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
5. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;serta
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**g. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan koordinasi kegiatan serta pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan dan jaminan sosial. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perencanaan kerja dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
2. perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
3. pelaksanaan koordinasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana, penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagian terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik,

mental yang derajat ke disabilitasnya tergolong berat, serta serta ekspenderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi, serta Penguatan Program Keluarga Harapan, Program Rastra maupun validitas program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, pedoman teknis, identifikasi, assessment serta penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi psiko sosial, mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta, reassessment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migrant bermasalah dan pemulangan orang terlantar;

4. pelaksanaan dan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
5. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;serta
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

**h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator. Sub Koordinator Pelaksana Fungsi

Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**Struktur Organisasi Dinas Sosial**

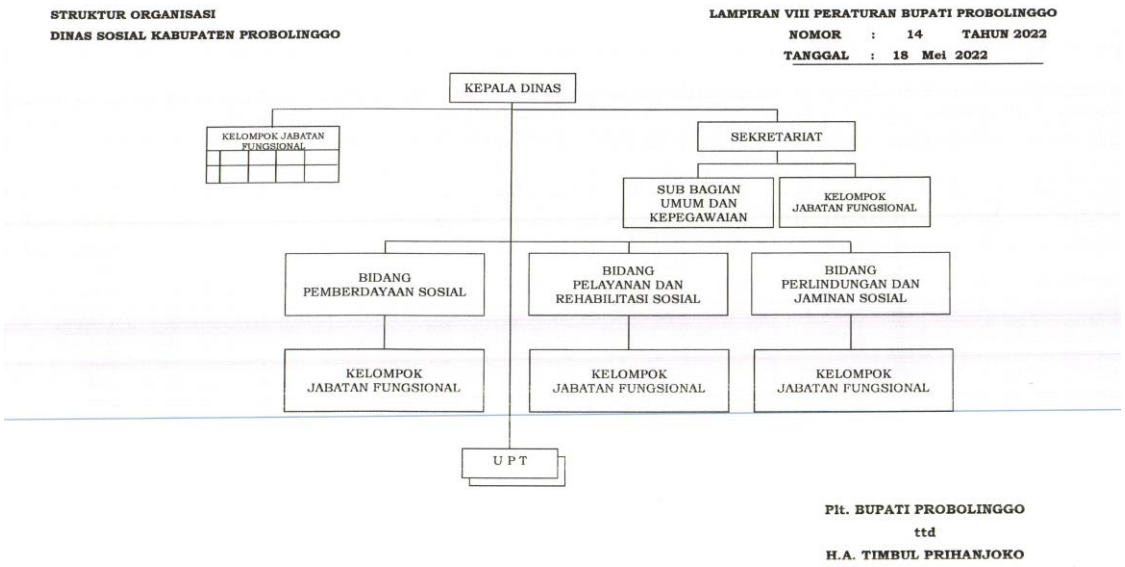

**b. Sumber daya Perangkat Daerah**

Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran, program, kegiatan hingga subkegiatan pada Dinas Sosial.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Sosial sesuai struktur organisasi terdiri dari :

| No | Jabatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas | 1 |
| 2 | Sekretaris | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | 3 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian | 1 |
| 5 | Jabatan Fungsional | 7 |
| 6 | Staf | 10 |
| **JUMLAH** | | 36 |

Berdasarkan jenjang pendidikan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Strata 2 | 6 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Strata 1 | 14 |
| 3 | Diploma III | 2 |
| 4 | SMA/Sederajat | 14 |
| **JUMLAH** | | 36 |

Untuk Nilai Asset pada Dinas Sosial tahun 2024 dapat dijaleaskan pada tabel berikut :

| Nilai Aset Tahun Anggaran 2024 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Akun Neraca | Stok Awal | Tribulan 1 | | Semester I | | Tribulan 3 | | Tribulan 4 | | Saldo Akhir |
| | | | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang | |
| A | ASET | | | | | | | | | | |
| 1 | Tanah | Rp. 790,000,000 | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 790,000,000 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | Rp. 2,951,255,993 | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 2,951,255,993 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | Rp. 1,595,517,100 | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 426,742,651 | Rp. (0) | Rp. 2,022,259,751 |
| 4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | Rp. 25,553,500 | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 25,553,500 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | Rp. 1,350,000 | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 1,350,000 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 |
| B | ASET LAINNYA | | | | | | | | | | |
| 1 | Aset Tidak Berwujud | Rp. 114,015,000 | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 114,015,000 |
| 2 | Aset Lain-Lain | Rp. 509,690,900 | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 0 | Rp. (0) | Rp. 509,690,900 |

Sedangkan untuk SDM PKH yang merupakan mitra kerja Dinas Sosial dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

| KECAMATAN | PENDAMPING SOSIAL | KOORDINATOR KAB/KOTA | Grand Total |
|---|---|---|---|
| BANTARAN | 7 | | 7 |
| BANYUANYAR | 13 | | 13 |
| BESUK | 14 | | 14 |
| DRINGU | 10 | | 10 |
| GADING | 15 | | 15 |
| GENDING | 10 | | 10 |
| KOTAANYAR | 13 | | 13 |
| KRAKSAAN | 10 | | 10 |
| KREJENGAN | 11 | | 11 |
| KRUCIL | 19 | | 19 |
| KURIPAN | 8 | | 8 |
| LECES | 10 | | 10 |

| KECAMATAN | PENDAMPING SOSIAL | KOORDINATOR KAB/KOTA | Grand Total |
|---|---|---|---|
| LUMBANG | 6 | | 6 |
| MARON | 18 | | 18 |
| PAITON | 10 | | 10 |
| PAJARAKAN | 9 | | 9 |
| PAKUNIRAN | 10 | | 10 |
| SUKAPURA | 1 | | 1 |
| SUMBER | 2 | | 2 |
| SUMBERASIH | 11 | | 11 |
| TEGALSIWALAN | 10 | | 10 |
| TIRIS | 14 | | 14 |
| TONGAS | 12 | | 12 |
| WONOMERTO | 7 | | 7 |
| PROBOLINGGO | | 3 | 3 |
| **Grand Total** | **250** | **3** | **253** |

**c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan yang ada di Dinas Sosial merupakan standart pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial. Hasil capaian kinerja SPM yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial pada Tahun 2020-2024 tertera pada tabel berikut ini

Capaian SPM Dinas Sosial Tahun 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Capaian SPM | Satuan | Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | 100 | 100 |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial | % | 100 | 100 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Capaian SPM | Satuan | Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi |
| | | diluar panti | | | |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | 100 | 100 |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | % | 100 | 100 |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana | Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | % | 100 | 100 |

Sumber: Laporan SPM Tahun 2024

Sedangkan dari sisi capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci dari Dinas Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Tahun | Indikator Kinerja Kunci | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan | 356 | 356 | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | | | |
| 2023 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 6054 | 6054 | 100 |
| 2024 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 2517 | 2517 | 100 |
| | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran | 98 | 98 | 100 |

Sumber : Data SILPPD 2022-2024

Dapat dijelaskan bahwa dari tabel capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial dari Tahun 2022 hingga 2024 pelayanan pada Dinas Sosial mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Penurunan disini dijelaskan terjadi perubahan dalam metode penghitungan capaian kinerja pelayanan. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi pelayanan untuk masyarakat.

Dalam sisi anggaran dan realisasi di Dinas Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Tahun | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2022 | 37.772.365.061 | 36.172.545.726 | 95,76 |
| 2023 | 35.465.858.072 | 32.671.643.983 | 92,12 |
| 2024 | 29.559.644.646 | 28.542.682.839 | 96,56 |

Sumber data : LRA SIPD 2022-2024

Dari tabel diatas data dijelaskan bahwasanya Dinas Sosial dalam hal anggaran khususnya urusan sosial mengalami penurunan yang cukup signifikan hal tersebut tidak mengurangi pencapaian dalam realisasi program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

### 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah , maka Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di Bidang Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang sosial. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan sosial. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Adapaun permasalahan tersebut dapat ditampilkan di tabel berikut ini

**Tabel 1. 2 : Pemetaan Permasalahan pada Dinas Sosial**

| Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Penurunan angka Kemiskinan belum optimal | Kurangnya integrasi data dalam rangka penanganan penduduk miskin | Akurasi Data base kemiskinan dalam hal ini DTKS |
| | Peran beberapa OPD dalam penurunan angka kemiskinan | Masih ada OPD yang belum optimal dalam kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan |
| | Pengunaan DTSEN dalam mengurangi angka kemiskinan | DTSEN yang belum optimal |
| Penanganan dan pembinaan PPKS masih belum optimal | Efektifitas dalam penanganan PPKS | Cakupan Layanan Penanganan PPKS khususnya memberikan |

| | | |
|---|---|---|
| | | perlindungan dan jaminan sosial , rehabilitasi sosial serta pemberdayaan sosial guna meningkatkan fungsi sosial dalam bermasyarakat |
| | Capaian SPM khususnya dibidang Sosial perlu ada peningkatan | Capaian pada dinas Sosial khusunya pencapaian SPM perlu peningkatan dalam pelayanan dan peningkatan SDM guna mendukung kesejahteraan sosial |

### 2.2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Sosial dapat dijelaksan bahwa dalam pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial perlu mendapatkan dukungan yang lebih. Dukungan yang lebih bisa dikaitkan penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, penambahan anggaran yang berkaiatn langsung dengan capaian SPM, Indikator Kinerja Kunci dan Program Kegiatan yang mendukung kesejahteraan sosial.

Jika dikaitkan dengan dokumen KLHS, dinas sosial berperan aktif dalam isu-isu sosial seperti Masih adanya permasalahan kesetaraan gender dan diskriminasi sosial lainnya dalam masyarakat (disablilitas).

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | | | | |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | | | | |
| Masih adanya permasalahan kesetaraan gender dan diskriminasi sosial lainnya dalam masyarakat (disablilitas) | pemberdayaan masayarakat khususnya disabilitas masih belum mmendapatakn dukungan anggaran yang signifikan | Masih adanya permasalahan kesetaraan gender dan diskriminasi sosial lainnya dalam masyarakat (disablilitas) | | | | Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara pendapatan dan kehidupan sosial. Pemberdayaan masyarakat ini mempunyai banyak sasaran diantaranya KUBE, Pemberian bimbingan sosial baik untuk wanita rawan ekonomi hingga masyarakat berpenghasilan rendah hingga pemberdayaan disabilitas guna meningkatkan kemampuan sosialnya. |

### 2.2.3 Isu strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo bahwa penanganan bidang sosial ini dapat dimunculkan dengan satu strategi. Penentuan isu strategis pada perangkat daerah ini di dasarkan pada

perkembangan dewasa ini yang sangat fleksibel. Adapaun isu strategis pada Dinas Sosial yaitu :

1. Capaian dalam realisasi program dan kegiatan yang mendukung SPM. Dalam pelaksanaan SPM masih terkendala dalam realisasi SPM yang merupakan pelayanan urusan sosial kepada masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara pendapatan dan kehidupan sosial. Pemberdayaan masyarakat ini mempunyai banyak sasaran diantaranya KUBE, Pemberian bimbingan sosial baik untuk wanita rawan ekonomi hingga masyarakat berpenghasilan rendah hingga pemberdayaan disabilitas guna meningkatkan kemampuan sosialnya.
3. Implementasi penggunaan DTSEN yang merupakan basis data dalam pelaksanaan segalam macama pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Khusunya masyarakat miskin dan rentan.
4. Menurunnya nilai-nilai Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Seiring dengan perkembangan gaya hidup individualisme dalam masyarakat secara simultan juga berkembang pergeseran nilai dalam masyarakat berupa lunturnya rasa kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian dan keharmonisan sosial serta makin rendahnya nasionalisme yang ditunjukkan dengan menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kebangsaan/ kepahlawanan dan penghargaan terhadap keluarga pahlawan/perintis kemerdekaan

5. Implementasi sekolah rakyat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dari pokok permasalahan isu strategi diatas maka dijabarkan ke dalam isu strategis berdasarkan kelompok-kelompok sasaran. Kelompok-kelompok sasaran tersebut dalam dilihat dalam tabel berikut ini:

**Isu strategis berdasarkan kelompok sasaran**

| **Isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran** | **Permasalahan Pokok** | |
|---|---|---|
| Kemiskinan | 1 | Ketersediaan data base PPKS yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan |
| | 2 | Sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai guna meningkatkan pelayanan dalam kesejahteraan sosial |
| | 3 | Sinergi antara program hingga subkegiatan serta dukungan pendanaan yang langsung berkontribusi dalam rangka penuurunan angka kemiskinan |
| Ketelantaran | 1 | Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representatif (shelter) bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah PPKS |
| | 2 | Masih rendahnya orang dengan kecacatan (ODK) yeng memperoleh pelayanan sosial dan |

| | | |
|---|---|---|
| | | bantuan terutama jaminan sosial dan alat kecacatan bagi ODK. |
| Korban Bencana | 1 | Ancaman bencana alam dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo |
| | 2 | Konflik sosial akibat pergesekan kepentingan yang berlatar ekonomi, budaya, suku, politik dan sosial merupakan ancaman yang perlu di Waspadai |

# BAB III
# TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Rencana Startegis Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, program prioritas, serta strategi pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Renstra ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi, serta Program hingga sub kegiatan yang mendukung target Bupati dan Wakil Bupati 2025-2029

Visi pembangunan daerah merupakan gambaran kondisi Kabupaten Probolinggo yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam jangka lima tahun ke depan. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing”)**

Visi Kabupaten Probolinggo menjadi dasar yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025-2029. Penjabaran dari visi tersebut akan dijelaskan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 3. 1 Penjelasan Pokok-Pokok Visi**

| Visi | Pokok-Pokok Visi | Penjelasan Visi |
|---|---|---|
| **Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing** | Sejahtera | Keadaan dimana terwujud pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dimana pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo ditandai dengan terwujudnya individu-individu masyarakat yang sejahtera baik secara sosial maupun ekonomi, dalam lingkungan sosial yang kondusif bagi pembangunan. Secara eksplisit, makna "sejahtera" merujuk pada Kabupaten Probolinggo yang "SAE" (baik), baik dari segi kualitas sumber daya manusianya, khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan (SAE Pendidikan dan Kesehatan) maupun aspek ketahanan sosialnya (SAE Sosial). |
| | Amanah-Religius | Keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Probolinggo mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas tinggi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai anti-korupsi sehingga menjadi pemerintah yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah daerah juga mampu menyelenggarakan pembangunan secara efektif melalui kolaborasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan sehingga terwujud pemerintahan yang SAE (baik) |
| | Eksis-Berdaya Saing | Keadaan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan lingkungan sosial yang sehat dengan budaya yang maju. Menggunakan cara-cara baru dan inovatif untuk perbaikan Pembangunan. Memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam setiap langkah pembangunan. Kabupaten Probolinggo memiliki daya saing yang kuat dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam keberhasilan capaian pembangunannya. **SAE ekonomi dan infrastrukturnya,** yaitu maju secara |

| Visi | Pokok-Pokok Visi | Penjelasan Visi |
|---|---|---|
| | | ekonomi, didukung infrastruktur yang berkualitas, merata, serta berpijak pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan |

Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan, memberikan arah yang jelas, sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan dengan Pokok-pokok visi sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Keterkaitan Pokok – Pokok Visi Terhadap Misi**

| No. | Pokok – Pokok Visi | Misi |
|---|---|---|
| 1. | Sejahtera | Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau |
| | | Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas |
| 2. | Amanah - Religius | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif |
| 3. | Eksis – Berdaya Saing | Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil, serta perwilayahan industri secara merata |
| | | Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan |

Adapun penjelasan misi, sebagaimana disajikan dalam uraian berikut :

Dalam mendukung visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dinas Sosial mendukung Misi 2 yaitu SAE EKONOMI yang penjelasannya sebagai berikut :

***Misi 2 : Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang Kreatif dan Inovatif di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Berbasis Desa dan Komunitas Untuk Menciptakan Lapangan Kerja dan Memberantas Kemiskinan (SAE Ekonomi)***

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat memperkuat daya saing daerah terutama dalam meningkatkan nilai investasi, salah satunya melalui revitalisasi BUMD. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui peningkatan produktivitas para pelaku ekonomi maupun sektor-sektor unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, industri, dan perdagangan yang terstandarisasi secara global, berakar pada budaya local dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dinas Sosial mendukung misi 2 dengan didukung program hingga sub kegiatan yang dapat mendukung pencapaian misi tersebut. Dengan tujuan meningkatkan perlindungan sosiaal adaptif dengan cara memberikan raehabilitasi sosial,perlindungan dan jaminan sosial, melakukan pemberdayaan sosial kepada masyarakat serta memberikan perlindungan kepada korban pasca bencana alam dan korban bencana sosial.

Dengan isu-isu strategis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya tujuan dan sasaran Dinas Sosial diharapak selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjawab isu strategis pembangunan dalam lima tahun mendatang, sekaligus menjadi pondasi penting dalam membangun Kabupaten Probolinggo yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Gambaran kesesuaian misi dalam menjawab isu strategis tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 3. 3 Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Untuk Menjawab Isu Strategis**

| No. | Isu Strategis | Misi |
|---|---|---|
| **1.** | Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Misi 2: SAE Ekonomi<br>Misi 5: SAE Sosial |
| **2.** | Pembangunan kewilayahan, khususnya infrastruktur daerah, dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) | Misi 4: SAE Infrastruktur |
| **3.** | Memutus transmisi kemiskinan melalui pendekatan kolaboratif yang berorientasi pada graduasi dan pemberdayaan dalam memenuhi kebutuhan dasar. | Misi 3: SAE Pendidikan dan Kesehatan<br>Misi 5: SAE Sosial |
| **4.** | Penguatan pondasi berbagai upaya peningkatan kualitas atau kompetensi sumberdaya manusia pelaku pembangunan pada layanan dasar, baik dari masyarakat, pelaku usaha, maupun aparatur pemerintah daerah. Khususnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar terutama bagi kelompok rentan. | Misi 1: SAE Pemerintahan<br>Misi 3: SAE Pendidikan dan Kesehatan |
| **5.** | Penguatan pondasi berbagai upaya penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dengan optimalisasi aktivitas ekonomi hijau dan biru berbasis sumberdaya lokal | Misi 2: SAE Ekonomi<br>Misi 4: SAE Infrastruktur |
| **6.** | Penguatan pondasi berbagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah maupun permukiman yang berwawasan lingkungan dan aman bencana | Misi 4: SAE Infrastruktur |
| **7.** | Penguatan pondasi tata kelola pemerintahan yang gesit (agile), kolaboratif, dan pelayanan publik yang adaptif | Misi 1: SAE Pemerintahan |
| **8.** | Penguatan pengelolaan keuangan daerah: optimalisasi peningkatan PAD; kelembagaan pengelolaan belanja daerah yang transparan dan akuntable dengan memanfaatkan dan kerjasama | Misi 1: SAE Pemerintahan |

| No. | Isu Strategis | Misi |
|---|---|---|
| | antar stakeholder pembangunan | |

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, visi dan misi Kabupaten Probolinggo tahun 2025–2029 juga disusun dengan memperhatikan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Keselarasan ini menjadi landasan penting agar pelaksanaan pembangunan di daerah tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi bagian yang terintegrasi dari pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang secara menyeluruh. Selain itu, keselarasan ini juga memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo mampu berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional, sekaligus menjawab tantangan dan isu strategis daerah. Berikut merupakan keselarasan visi dan misi Kabupaten Probolinggo terhadap Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

**Tujuan dan Sasaran Misi 2:**

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan gambar di atas, tujuan ini diturunkan menjadi 4 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif;
4. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif | Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif | | Persentase penurunan PPKS | 4.02 | 4,44 | 4,94 | 5,54 | 6,30 | 7,26 | |
| | | Meningkatnya PPKS yang tertangani | Persentase PPKS yang tertangani | 87,98 | 88,54 | 89,19 | 89,96 | 90,87 | 91,96 | |
| | | Meningkatnya Kualitas tata kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | 0,32 | 0,38 | 0,69 | 0,78 | 0,94 | 1,11 | |
| | | | | | | | | | | |

**DEFINISI OPERASIONAL TUJUAN DAN SASARAN PADA DINAS SOSIAL**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIOANAL | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif | Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif | | Persentase penurunan PPKS | Penurunan PPKS dapat diukur dengan mengumpulkan data tentang jumlah PPKS sebelum dan sesudah intervensi atau program tertentu yang mendukung kesejahteraan sosial. | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIOANAL | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penurunan ini diukur dengan membandingkan jumlah PPKS pada periode tertentu dengan jumlah PPKS pada periode sebelumnya | |
| | | Persentase PPKS yang tertangani | Persentase PPKS yang tertangani | PPKS yang tertangai dapat diartikan sebagai PPKS yang telah mendpaatkan perlindungan , rehabilitasi, ataupun pemberdayaan sosial yang ditangani atapun yang terfasilitasi oleh Dinas Sosial pada satu tahun anggaran | |

## 3.2 Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan merumuskan langkah dan tahapan untuk mencapai sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal daerah. Sedangkan arah kebijakan menetapkan waktu pelaksanaan strategi tersebut dalam periode lima tahun RENSTRA. Arah kebijakan yang tepat akan menjadi dasar penentuan tema pembangunan tahunan dalam RKPD. Dengan demikian, strategi yang diterjemahkan ke dalam arah kebijakan dan program yang terukur akan menunjukkan keterkaitan logis terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD. Selanjutnya akan dibahas secara terperinci strategi, arah kebijakan, dan program RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029

**Tabel 3. 4 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Sosial Tahun 2025-2029**

| **VISI :**<br>**Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE" (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Misi 2**: Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan perindustrian berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan | Meningkatnya PPKS yang tertangani | Perlindungan sosial yang tepat sasaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang layak | Perluasan penyediaan bantuan dan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin, kelompok marjinal, dan masyarakat rentan yang merata dan tepat sasaran |
| | | | Memberikan kemudahan akses terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan serta pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat miskin, rentan, dan kelompok marjinal |
| | | | Upadate data terkaiat data kemiskinan guna memberikan kemudahan bagi OPD lain dalam rangka meningkatkan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ksejahteraan sosial seperti memberika bantuan untuk masyarakat |

### 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan merupakan landasan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dengan fokus pada prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan sepanjang periode perencanaan. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah, arah kebijakan dirancang untuk memastikan adanya kesinambungan antar tahapan pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Arah kebijakan menjelaskan bagaimana implementasi strategi pembangunan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Probolinggo.

Arah kebijakan pembangunan juga disusun berdasarkan Sasaran Pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2045. Oleh karena itu, tahapan-tahapan yang digariskan dalam RENSTRA ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas merupakan serangkaian program terpilih yang dianggap paling penting dan mendesak untuk dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Arah kebijakan pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dapat disajikan pada tabel berikut

| No | Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif | Perluasan penyediaan bantuan dan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin, kelompok marjinal, dan masyarakat rentan yang merata dan tepat sasaran | 1. melakukan updating data kemiskinan berkala melalui DTSEN guna menciptakan bantuan sosial yang sesuai sasaran guna meningkatkan kesejahteraan sosial<br>2. memperluas jangkauan penerima bantuan dengan melibatkan semua stakeholder dalam memberikan bantuan sosial.<br>3. meningkatkan pemberian bantuan sosial berupa peralatan usaha produktif guna meningkatkan pendapatan khusunya bagi masyarakat rentan dan masyarakat yang telah mempunyai embrio usaha melalui KUBE | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Memberikan kemudahan akses terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan serta pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat miskin, rentan, dan kelompok marjinal | 1. melakukan edukasi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat khusunya masyarakat rentan ataupun masyarakat miskin<br>2. melibatkan semua tenaga kesejahteraan sosial guna memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. | |
| | | | | |

Program prioritas Dinas Sosial yang mengacu pada janji politik Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2025-2029 yang telah dilakukan penyelarasan antara Tujuan dan Sasaran RENSTRA. Pelaksanaan program prioritas diharapkan mampu mencapai tujuan Pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Program prioritas Dinas Sosial 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel**

**Program Prioritas Pembangunan Dinas Sosial Tahun 2025-2029**

| PROGRAM PRIORITAS BUPATI | | SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS | | PENJELASAN |
|---|---|---|---|---|
| **10** | **SAE Kesempatan Kerja** | 29 | 500 KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) BERBASIS RT/RW | memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lokal dengan membentuk kelompok usaha yang melibatkan warga di setiap RT/RW. Program ini akan memberikan dukungan berupa pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan manajemen usaha bagi setiap KUB, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha bersama yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi lokal. Dengan pendekatan berbasis komunitas ini, diharapkan tercipta peluang usaha baru, peningkatan pendapatan keluarga, dan penguatan ekonomi masyarakat secara mandiri, yang pada akhirnya akan memperkuat perekonomian Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan |
| | **SAE DISABILITAS DAN WARGA RENTAN** | 55 | REGULASI DAERAH YANG MELINDUNGI DISABILITAS | Perda yang mengatur perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, mencakup aksesibilitas terhadap fasilitas publik, pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan kesempatan kerja yang setara.<br>Perda juga akan menjamin penanganan yang cepat dan tepat bagi korban bencana alam. Regulasi ini juga akan memastikan adanya perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, selama proses tanggap darurat dan pemulihan. Selain itu akan dilakukan perbaikan drainase dan pengerukan sungai, penguatan lereng melalui tanggul dan penanaman pohon, serta pelatihan tanggap darurat berbasis masyarakat, bantuan ekonomi disertai program trauma healing akan diprioritaskan bagi wilayah terdampak untuk meningkatkan ketahanan dan |

| PROGRAM PRIORITAS BUPATI | | SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS | | PENJELASAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | kesiapsiagaan komunitas dalam menghadapi risiko bencana. Selain itu, Perda akan menyediakan jaminan sosial dan bantuan bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti orang miskin, lanjut usia, anak terlantar, korban kekerasan, dan korban bencana alam |

# BAB IV
# PROGAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 4.1 Program Dinas Sosial

Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026 sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKBGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif | Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif | | | | Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif | | |
| | | Persentase PPKS yang tertangani | | | Persentase PPKS yang tertangani | | |
| | | | Meningkatnya rehabilitasi sosial | | Meningkatnya rehabilitasi sosial | Program Reahbilitasi Sosial | |
| | | | | meningkatnya PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar | meningkatnya PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | |
| | | | | | | Penyediaan Permakanan | |
| | | | | | | Penyediaan Sandang | |
| | | | | | | Penyediaan Alat Bantu | |
| | | | | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | |
| | | | | | | Pemberian Bimbingan fisik,Mental , Spiritual dan sosial | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKBGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | |
| | | | | | | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | |
| | | | | | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | |
| | | | | | | Pemberian layanan rujukan | |
| | | | | meningkatnya PPKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA dil luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | meningkatnya PPKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA dil luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | |
| | | | | | | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | |
| | | | | | | Pemyediaan perbekalan kesehatan di luar panti | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKBGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | |
| | | | | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | |
| | | | | | | Pemberian layanan rujukan | |
| | | | | | | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota | |
| | | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| | | | | meningkatnya pengelolaan data Fakir miskin | meningkatnya pengelolaan data Fakir miskin | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | |
| | | | | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | |
| | | | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKBGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan sosial | | Meningkatnya pemberdayaan sosial | Program Pemberdayaan Sosial | |
| | | | | meningkatnya pengembangan PSKS | meningkatnya pengembangan PSKS | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKBGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | |
| | | | | | | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | |
| | | | | | | Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKBGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial | |
| | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya perlindungan sosial dan jaminan sosial untuk korban bencana alam dan sosial | | Meningkatnya perlindungan sosial dan jaminan sosial untuk korban bencana alam dan sosial | Program Penanganan Bencana | |
| | | | | meningkatnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial | meningkatnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Penyediaan Makanan | |
| | | | | | | Pelayanan Dukungan Psikososial | |
| | | | | | | | |
| | | | | meningkatnya pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana | meningkatnya pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKBGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | |
| | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya tata kelola TMP | | Meningkatnya tata kelola TMP | Program Pengelolaan Tamam Makam Pahlawan | |
| | | | | meningkatnya pemeliharaan TMP | meningkatnya pemeliharaan TMP | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase peningkatan PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial** | **0,72** | **7,35** | **2.661.025.800** | **7,78** | **2.927.128.380** | **8,21** | **3.249.112.502** | **8,65** | **3.606.514.877** | **9,51** | **3.963.917.252** | |
| **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **Presentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar** | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 orang | 100 orang | 23.759.000 | 100 orang | 25.000.000 | 100 orang | 30.000.000 | 100 orang | 35.000.000 | 100 orang | 40.000.000 | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Penyediaan sandang | Jumlah Orang yang MenerimaPakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 orang | 10 orang | 5.000.000 | 15 orang | 6.000.000 | 20 orang | 7.000.000 | 25 orang | 8.000.000 | 30 orang | 9.000.000 | |
| Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 orang | 15 orang | 27.150.000 | 15 orang | 30.000000 | 17 orang | 35.000.000 | 20 orang | 40.000.000 | 25 orang | 45.000.000 | |
| Pemberian Pelayanan reunifikasi keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 orang | 10 orang | 5.000.000 | 15 orang | 6.000.000 | 20 orang | 7.000.000 | 25 orang | 8.000.000 | 30 orang | 9.000.00 | |
| Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan | 0 | 50 orang | 16.670.000 | 50 orang | 20.000.000 | 50 orang | 23.000.000 | 50 orang | 26.000.000 | 50 orang | 29.000.000 | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 630 orang | 650 orang | 2.1000.000 | 700 orang | 2.100.000.000 | 700 orang | 2.100.000.000 | 700 orang | 2.100.000.000 | 700 orang | 2.100.000.000 | |
| Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Jumlah Orangyang Mendapatkan PelayananPenelusuran KeluargaKewenangan Kabupaten/Kota | 0 orang | 10 orang | 2.000.000 | 12 orang | 2.500.000 | 14 orang | 2.700.000 | 16 orang | 2.900.000 | 18 orang | 3.100.000 | |
| Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 orang | 15 orang | 7.000.000 | 15 orang | 7.000.000 | 15 orang | 7.000.000 | 15 orang | 7.000.000 | 15 orang | 7.000.000 | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | **Presentase PPKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA dil luar Panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial** | | | | | | | | | | | | |
| Pemberian layanan data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan PengaduanKewenangan Kabupaten/Kota | 0 orang | 50 orang | 5.000.000 | 55 orang | 5.500.00 | 60 orang | 6.000.000 | 65 orang | 6.500.000 | 70 orang | 7.000.000 | |
| Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan PerbekalanKesehatandi Luar PantiKewenangan Kabupaten/Kota | 0 orang | 10 orang | 5.000.000 | 11 orang | 5.500.000 | 12 orang | 6.000.000 | 13 orang | 6.500.000 | 14 orang | 7.000.000 | |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 orang | 50 orang | 3.000.000 | 70 orang | 5.000.000 | 80 orang | 7.000.000 | 90 orang | 9.000.000 | 100 orang | 11.000.000 | |
| Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama | | 2 dokumen | 5.000.000 | 3 dokumen | 7.000.000 | 5 dokumen | 9.000.000 | 4 dokumen | 11.000.000 | 6 dokumen | 13.000.000 | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Kabupaten/Kota | antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Presentase peningkatan PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial** | | **7,46** | **23.956.330.529** | **7,82** | **25.045.254.644** | **8,17** | **26.134.178.759** | **8,53** | **27.223.102.874** | **8,88** | **28.312.026.989** | |
| **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | |
| Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 10.000 Orang | 10.050 orang | 11.830.000 | 10.100 orang | | 10.151 orang | | 10.202 orang | | 10.253 orang | | |
| Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi | 0 | 50 orang | 21.766.386.200 | 70 orang | | 80 orang | | 90 orang | | 100 orang | | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 14.105 KK | 14.176 KK | 9.708.400 | 14.246 KK | | 14.318 KK | | 14.318 KK | | 14.318 KK | | |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | 10.000 Orang | 10.050 orang | 5.000.000 | 10.100 orang | | 10.151 orang | | 10.202 orang | | 10.253 orang | | |
| **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Presentase kasus bencana alam dan sosial yang tertanganl** | **100 %** | **100 %** | **117.310.560** | **100 %** | **124.518.840** | **100 %** | **131.717.120** | **100 %** | **138.920.400** | **100 %** | **146.123.680** | |
| **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial** | | | | | | | | | | | | | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| **Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 orang | 125 orang | 43.790.000 | 150 orang | 45.000.000 | 175 orang | 47.000.000 | 200 orang | 49.000.000 | 225 orang | 51.000.000 | |
| Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 orang | 50 orang | 25.000.000 | 75 orang | 30.000.000 | 100 orang | 35.000.000 | 125 orang | 40.000.000 | 150 orang | 45.000.000 | |
| **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga | Jumlah Kampung yang Melaksanakan | 0 kampung | 2 kampung | 10.650.000 | 2 kampung | | 2 kampung | | 2 kampung | | 2 kampung | | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Bencana | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 51 orang | 51 orang | 12.318.000 | 51 orang | | 51 orang | | 51 orang | | 51 orang | | |
| **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **Presentase TMP yang terpelihara dengan baik** | **100 %** | **100 %** | | **100 %** | | **100 %** | | **100 %** | | **100 %** | | |
| Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | 2 dokumen | 2 dokumen | 0 | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 43 Makam | 43 Makam | 15.362.000 | 43 Makam | | 43 Makam | | 43 Makam | | 43 Makam | | |
| Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 0 | 2 Laporan | | 2 Laporan | | 2 Laporan | | 2 Laporan | | 2 Laporan | | |
| Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 0 | 43 orang | 5.000.000 | 43 orang | | 43 orang | | 43 orang | | 43 orang | | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 0 | 10 orang | 3.000.000 | 10 orang | | 10 orang | | 10 orang | | 10 orang | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **PSKS yang diberdayakan** | **100 %** | **100 %** | **756.709.200** | **100 %** | **803.173.800** | **100 %** | **849.638.400** | **100 %** | **896.103.000** | **100 %** | **942.567.600** | |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 keluarga | 100 keluarga | 400.000.000 | 100 keluarga | | 100 keluarga | | 100 keluarga | | 100 keluarga | | |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Lembaga | 5 Lembaga | 10.000.000 | 5 Lembaga | | 5 Lembaga | | 5 Lembaga | | 5 Lembaga | | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial | 0 orang | 42 orang | 210.000.000 | 42 orang | | 42 orang | | 42 orang | | 42 orang | | |
| Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | 0 orang | 15 orang | 15.303.200 | 17 orang | 16.000.000 | 19 orang | 16.500.000 | 21 orang | 17.000.000 | 24 orang | 17.500.000 | |
| Peningkatan | Jumlah Sumber | 15 | 15 | 14.999.840 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota | sertifikat | sertifikat | | sertifikat | | sertifikat | | sertifikat | | sertifikat | | |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya | 0 orang | 24 orang | 5.000.000 | 24 orang | | 24 orang | | 24 orang | | 24 orang | | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi | 0 | 40 orang | | 45 orang | | 50 orang | | 55 orang | | 60 orang | | |
| Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi | 0 Lembaga | 5 lembaga | | 5 lembaga | | 5 lembaga | | 5 lembaga | | 5 lembaga | | |
| **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah** | **76,56** | **77,17** | | **77,86** | | **78,64** | | **79,58** | | **80,69** | | |
| **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2 dokumen | 25.606.000 | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja | | 3 dokumen | 14.586.000 | 3 dokumen | | 3 dokumen | | 3 dokumen | | 3 dokume | | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | n | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 3 dokumen | 4.200.000 | 3 dokumen | 4.500.000 | 3 dokumen | 5.000.000 | 3 dokumen | 5.500.000 | 3 dokumen | 6.000.000 | |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 orang | 26 orang | 3.841.212.595 | 26 orang | | 26 orang | | 26 orang | | 26 orang | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 2 dokumen | 2 dokumen | 4.200.000 | 2 dokumen | 4.500.000 | 2 dokumen | 4.700.000 | 2 dokumen | 5.000.000 | 2 dokumen | 5.500.000 | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 7.978.300 | 12 Paket | 8.000.000 | 12 Paket | 8.200.000 | 12 Paket | 8.500.000 | 12 Paket | 9.000.000 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 15.083.199 | 12 Paket | 15.500.000 | 12 Paket | 15.700.000 | 12 Paket | 15.900.000 | 12 Paket | 21.000.000 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 6.600.000 | 12 Paket | 7.000.000 | 12 Paket | 7.400.000 | 12 Paket | 7.800.000 | 12 Paket | 8.200.000 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 115 Laporan | 41.668.160 | 120 Laporan | 42.000.000 | 125 Laporan | 42.500.000 | 130 Laporan | 43.000.000 | 135 Laporan | 43.500.000 | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Aset Tetap | Jumlah Unit | 10 unit | 10 unit | 36.552.000 | 10 unit | 40.000 | 10 unit | 45.000.000 | 10 unit | 50.000.000 | 10 unit | | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Lainnya | Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | | .000 | | | | | | | |
| **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 72.806.860 | 12 Laporan | 73.000.000 | 12 Laporan | 73.500.000 | 12 Laporan | 74.000.000 | 12 Laporan | 74.500.000 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Paket surat menyurat yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 6.309.000 | 12 Paket | 6.500.000 | 12 Paket | 6.700.000 | 12 Paket | 6.900.000 | 12 Paket | 7.200.000 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 377.065.640 | 12 Laporan | | 12 Laporan | | 12 Laporan | | 12 Laporan | | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara | 11 unit | 11 unit | 147.288.000 | 11 unit | 150.000.000 | 11 unit | 155.000.000 | 11 unit | 160.000.000 | 11 unit | 165.000.00 | |

| Bidang urusan/Program/Outcame/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output | Indikator Outcame/Output | *Baseline 2024* | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Lapangan | dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan da nPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatanyangDipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 4 unit | 4 unit | 75.000.000 | 4 unit | 80.000.000 | 4 unit | 85.000.000 | 4 unit | 90.000.000 | 4 unit | 95.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Sedangkan untuk untuk Program ,kegiatan dan sub kegiatan Prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan Misi Kepala Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut :

| No | Nama Program Prioritas | Outcome | Sub Kegiatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Berbasis RT/RW | Meningkatnya pemberdayaan sosial | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| 2 | Sekolah Rakyat (SR) | Meningkatnya rehabilitasi sosial | Pemberian Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | |
| 3 | Regulasi Daerah Yang Melindungi Disabilitas | Meningkatnya pemberdayaan sosial | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | |

## 4.2 Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja penyelenggaraan daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD ini sangat penting karena akan menjadi acuan dalam perumusan target kinerja perencanaan pembangunan jangka pendek daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja/Renja).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengarahkan agar disediakan tiga kelompok indikator kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi;

2) Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci;
3) Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Penetapan IKU, IKD dan IKK serta penentuan target pencapaiannya dalam dokumen RPJMD sangat penting karena menggambarkan ketercapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah yang identik dengan gambaran kesejahteraan masyarakat. Penetapkan target IKU dan IKK didasarkan atas evaluasi terhadap keberhasilan / capaian pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah sebelumnya, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026. Pada sisi lain target IKU dan IKD merupakan ukuran yang dipergunakan untuk pengendalian dan evaluasi proses pembangunan ke depan, untuk mengetahui apakah sudah berada di arah yang tepat sebagaimana dimaksud dalam substansi Visi dan Misi RPJMD.

Pada tabel 4.3 disajikan Idikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana dimaksud untuk menggambarkan ukuran kinerja *outcome* setiap Perangkat Daerah pada periode RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029. Selanjutnya berbagai target kinerja yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) menjadi acuan dalam penyusunan target kinerja dalam dokumen perencanaan Perangkat daerah, baik perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis Perangkat Daerah) maupun rencana jangka pendek (Rencana Kerja Perangkat Daerah)

**Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial**
**( Indikator Tujuan sasaran PD)**

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Baseline | Target Tahunan | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif | Persentase Penurunan PPKS | Presentase | 3,99 | 4,02 | 4,44 | 4,94 | 5,54 | 6,3 | 7,26 | |
| 2 | Meningkatnya PPKS yang Tertangani | Persentase PPKS yang tertangani | Persentase | 87,65 | 87,98 | 88,54 | 89,19 | 89,96 | 90,87 | 91,96 | |

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial**

| No | Indikator | Satuan | Baseline | Target Tahunan | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

# BAB V

# PENUTUP

Perencanaan pembangunan daerah dalam kurun lima tahun disiapkan sebagai informasi tentang komitmen politik kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dalam pilkada tahun 2024. perencanaan diuraikan setiap lima tahun dalam Rencana Strategis Dinas Sosial . Renstra adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan cita-cita, harapan, kebijakan yang dituangkan dalam program kepala daerah, termasuk kebijakan yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pengembangan regional, keuangan daerah, dan indikasi kerangka pendanaan pembangunan selama lima tahun. Seiring dengan pemilihan kepala regional simultan di semua wilayah otonom Indonesia pada tahun 2024, kepala daerah baru dipilih untuk periode dari tahun 2025 hingga 2029, menciptakan desain Renstra baru untuk periode itu. Visi, misi, dan komitmen politik yang akan dilaksanakan tertuang dalam dokumen Renstra, Dinas Sosial untuk periode Renstra 2025 hingga tahun 2029.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah. Pada Bab II Bagian Keempat Pasal 41 hingga Pasal 72 Permendagri 86/2017, dijelaskan bahwa tata cara penyusunan Renstra yang terdiri dari enam tahap, yaitu persiapan penyusunan Renstra , penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, hingga penyusunan Rancangan Akhir Renstra.

## 5.1 Pedoman Transisi

Pedoman yang menjadi acuan umum pada saat periodisasi Renstra Dinas Sosial ini berakhir ditetapkan sebagai berikut:

1. Program prioritas dan/atau program strategis daerah yang telah dilaksanakan pada periode Renstra ini dan masih relevan / perlu dilanjutkan pada periode selanjutnya dan direkomendasikan untuk diakomodasi dalam Renstra periode berikutnya, dengan tujuan memaksimalkan layanan pemerintah oleh masyarakat

## 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan peralihan ini bertujuan untuk menyajikan berbagai hal penting terkait pelaksanaan perencanaan jangka menengah daerah dan menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga

terjadi efisiensi dan efektivitas pembangunan, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan program. Tata cara pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Apabila pada periode pelaksanaan Renstra ini terjadi perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, maka penyesuaian pengampu urusan tersebut dilakukan sedemikian rupa, dengan tetap mempedomani pengampu urusan atau tanpa merubah target *outcome* sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2030 ini;
2. Apabila pada periode pelaksanaan Renstra ini terjadi perubahan Nomenklatur Program Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo oleh Kebijakan Pemerintah Pusat, maka penyesuaiannya akan dilakukan penyesuaian sedemikian rupa tanpa merubah target *outcome* sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra ini;
3. Berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), RKPD Kabupaten Probolinggo merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan tetap mengacu pada target dan arah kebijakan tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial

Demikian pedoman transisi, kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PROBOLINGGO, 29 September 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**RACHMAD HIDAYANTO,S.Sos,M.Si**
**Pembina Utama Muda**
**NIP.197309171996021001**

# RENCANA KERJA
# DINAS TENAGA KERJA
# KABUPATEN PROBOLINGGO
# TAHUN 2026

## DINAS TENAGA KERJA
## KABUPATEN PROBOLINGGO

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga ***"Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026"*** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2026 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Probolinggo, 18 September 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO

**dr. ANANG BUDI YOELIJANTO., M.M.Kes., MMRS**
Pembina Utama Muda
NIP. 19670707 199703 1 004

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih bclum scmpurna, schingga pcrlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Probolinggo, 18 September 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO

**dr. ANANG BUDI YOELIJANTO., M.M.Kes., MMRS**
Pembina Utama Muda
NIP. 19670707 199703 1 004



Dipindai dengan CamScanner

**DAFTAR ISI**


| | | Halaman |
|---|---|---|
| Kata Pengantar | | i |
| Daftar Isi | | iii |
| Daftar Tabel | | iv |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | 1.1 Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| | 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II | Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD | |
| | Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD | 8 |
| | Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 13 |
| | Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD | 16 |
| | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 18 |
| | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 23 |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 33 |
| | Tujuan dan Sasaran Renja | 34 |
| | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 | 35 |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 48 |
| BAB V | PENUTUP | 60 |

## DAFTAR TABEL


| | | Halaman |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan Triwulan II) | 9 |
| Tabel 2.2 | T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja | 15 |
| Tabel 2.3 | T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 | 18 |
| Tabel 2.4 | T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 | 24 |
| Tabel 3.1 | T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 | 37 |
| Tabel 4.1 | Program dan Kegiatan Tahun 2026 | 53 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Review Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Penyusunan Renja 2026 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi dan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat Perangkat Daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat Pemerintah Daerah, dan program Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten dapat bersinergi dengan program Pembangunan Daerah di Tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo;
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2025 Tentang RKPD Tahun 2026;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo 2026 yaitu untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan evaluasi pelaksanaan Renja 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, yaitu :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten yang mengarah pada

pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;

2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pengawasan;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun lalu (2025), analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat kajian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, serta program dan kegiatan.

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

**BAB V. PENUTUP**

Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

# BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja memiliki tujuan “Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif serta Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas”.

Tujuan tersebut telah dikembangkan menjadi 3 Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Disabilitas yang bekerja di instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta.

Sedangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja memiliki tujuan:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat

Tujuan tersebut telah dikembangkan menjadi 4 Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Keterampilan/Kompetensi Tenaga Kerja
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
4. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha

Dari uraian diatas dapat kita lihat bersama bahwa tujuan serta sasaran Dinas Tenaga Kerja mengalami perubahan. Pada Renstra 2025-2029 Dinas Tenaga Kerja mengampu 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran. Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 (Triwulan II) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan Triwulan II)

Kabupaten Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan *(output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.01 | | | | Urusan wajib bukan pelayanan dasar | | | | | | | | | |
| | 01 | | | Tenaga Kerja | | | | | | | | | |
| | | **01** | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | | 78,71 | 80 | 78,71 | | 79,1 | | |
| | | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 19 dokumen | 16 dokumen dan 1 laporan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 85 % | 21 % | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | 35 pegawai PNS | 34 pegawai PNS | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 85 % | 49 % | - |
| | | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase dokumen administrasi Kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | | | | | | 85 % | | |
| | | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD | 12 bulan | 12 bulan | 85% | 85% | 100% | 85 % | 10 % | - |
| | | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | 12 bulan | 12 bulan | 2 Laporam | 12 bulan | 100% | 85 % | 37 % | - |
| | | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 2 unit kendaraan dinas, 3 unit sarpras dan 1 gedung | 2 unit kendaraan dinas, 3 unit sarpras | 6 Unit | 6 Unit | 100% | 85 % | 14 % | - |
| | | **03** | | **Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan/kompetensi** | | | **80%** | **80%** | **100%** | **80,3 %** | | |
| | | 03 | 1.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi | 22 pelatihan | 58 pelatihan | 768 Orang/Peserta | 768 Orang/Peserta | 100% | 100 % | 10 % | - |
| | | 03 | 2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina | | | | | | 60 % | | |
| | | 03 | | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | | | | | | 60 % | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Persentase Perusahaan Kecil yang difasilitasi bimbingan konsultasi | | | | | | 85 % | | |
| | | | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase tenaga kerja yang diukur produktivitasnya | | | | | | 12 % | | |
| | | **04** | | **Program Penempatan Tenaga Kerja** | **Persentase pencari kerja yang ditempatkan** | | | **42,5%** | **42,5%** | **100%** | **43 %** | | |
| | | 04 | 2.01 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja | 1 kali monitoring, 60 peserta Binjab, 7 lokasi padat karya | 10 Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 200 peserta Binjab | 85% | 85% | 100% | 85 % | 1 % | - |
| | | | | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase LPTKS yang diberikan rekomendasi izin | | | | | | 85 % | | |
| | | 04 | 2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Persentase informasi pasar kerja yang diberikan | | | 10 Informasi Pasar | 15 | 150% | 85 % | | - |
| | | | | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perlindungan PMI yang diberikan | | | 20 Orang | 28 Orang | 140% | 85 % | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 | 2.05 | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perpanjangan IMTA yang diterbitkan | | | - | - | - | 100 % | | - |
| | | **02** | | **Program Perencanaan Tenaga Kerja** | **Persentase Penyusunan dokumen rencana tenaga kerja (RTK)** | | | | | | **37 %** | | |
| | | 02 | 1.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun | | | - | - | - | 100 % | | - |
| | | **05** | | **Program Hubungan Industrial** | **Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak** | | | **36,5 %** | **36,5 %** | | **37 %** | | |
| | | 05 | 2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama | 3 kali sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan, 22 perusahaan | 1 laporan | 100 | 94% | 94% | 100 % | 14 % | - |
| | | 05 | 2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian masalah hubungan industrial | 2 kali sosialisasi | 2 kali sosialisasi | - | - | - | 100 % | 47 % | - |

Faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja dan rencana tindak lanjut untuk RKPD Tahun 2026

Selama proses pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hal yang mendorong tercapainya pelaksanaan kegiatan, diantaranya:

- Komitmen staff Disnaker yang bekerjasama dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan rencana, menyiapkan data dukung, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
- Meningkatnnya frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

Disisi lain, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan seperti :

- Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
- Tertundanya sebagian kegiatan karena terpetakannya jadwal kegiatan dalam pencapaian target kinerja.

Rencana Tindak Lanjut :

- Konsistensi sehingga anggaran yang dialokasikan diserap berdasarkan kebutuhan riil kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
- Penyediaan anggaran yang memadai berdasarkan tingkat prioritas kegiatan;
- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang tenaga kerja.

Dalam menentukan indikator program kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo berpedoman pada RPJMD 2025-2029. Sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029, Dinas Tenaga Kkerja mengemban tujuan, Yaitu “Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif serta Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas”.

Tujuan tersebut diterjemahkan pada 3 sasaran, Yaitu :

1. Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya Disabilitas yang Bekerja di Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta.

Indikator Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 2.2 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Probolinggo

| No | Indokator | Target Renstra PD | | | | Realisasai Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1. | Tingkat Pengangguran Terbuka | | | | | | 3,00 | 2,80 | 2,60 | |
| 2. | Persentase Disabilitas yang Berdaya (bekerja di sektor formal) | | | | | | 2 | 2,1 | 2,5 | |
| 3. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 74,63 | 74,81 | 75,15 | 75 | 69,48 | 73,18 | 73,30 | 73,50 | |
| 4. | Tingkat Kesempatan Kerja | 93,81 | 93,14 | 92,48 | 91,81 | 96,76 | 96,80 | 96,83 | 96,86 | |
| 5. | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan | | | | | | 24,20 | 33,12 | 34,83 | |
| 6. | Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0,5 | 0,8 | |
| 7. | Persentase disabilitas bekerja di instansi pemerintah | | | | | | 0,0005 | 1,6 | 1,8 | |
| 8. | Persentase disabilitas bekerja di perusahaan swasta | | | | | | 0,0002 | 0,5 | 0,7 | |

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo menghadapi beberapa permasalahan, hambatan, tantangan, serta peluang yang kemudian tercantum dalam isu strategis, yaitu:

1. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi penduduk lokal.

   Keterbatasan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi penduduk lokal adalah salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi penduduk lokal terjadi karena faktor internal (seperti keterampilan dan pendidikan) dan eksternal (seperti kurangnya industri dan investasi). Solusinya memerlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program pelatihan, meningkatkan investasi lokal, serta memperkuat sektor ekonomi daerah.
2. Masil rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasana pelatihan yang berbasisi kompetensi.

   Pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta penguatan fasilitas dan instruktur pelatihan hingga saat ini masih kita upayakan agar dapat berdampak dan kami juga mengambil kebijakan untuk melakukan kerjasama (MOU) dengan pihak stakeholder untuk pelaksanaan pelatihan.
3. Masih rendahnya minat untuk berwirausaha. Minat berwirausaha yang masih rendah bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga menyangkut budaya, keberanian mengambil risiko, akses terhadap sumber daya, dan dukungan ekosistem yang memadai. Mendorong kewirausahaan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendidikan hingga kebijakan dan pendampingan praktis.

4. Lapangan pekerjaan masih didominasi oleh sektor informal sehingga perlindungan terhadap pekerja masih rendah, saat ini kami mengupayakan untuk pekerja di sektor informal mendapat perlindungan jaminan sosial yang ditahun 2024 kami sudah mencapai 24,20%.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 telah ditetapkan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31 dapat menunjukan perbandingan Program / Kegiatan/ Sub kegiatan antara Ranwal RKPD dengan hasil Analisis Kebutuhan.

Tabel 2.3 T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Probolinggo

OPD: Dinas Tenaga Kerja

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota** | **kabupaten Probolinggo** | **Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah** | **79,73** | **Rp 6.424.075.368,00** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota** | **kabupaten Probolinggo** | **Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah** | **79,73** | **Rp 6.424.075.368,00** | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | kabupaten Probolinggo | Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 87% | Rp 22.500.000,00 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | kabupaten Probolinggo | Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 87% | Rp 22.500.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- | 4 dokumen | Rp 5.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 4 dokumen | Rp 5.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SKPD | | | | | Dokumen RKA-SKPD | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4 dokumen | Rp 5.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4 dokumen | Rp 5.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 dokumen | Rp 2.500.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 dokumen | Rp 2.500.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 dokumen | Rp 2.500.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 dokumen | Rp 2.500.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | Rp 7.500.000,00 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | Rp 7.500.000,00 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | kabupaten Probolinggo | Persentase dokumen Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | 87% | Rp 5.266.643.137,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | kabupaten Probolinggo | Persentase dokumen Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | 87% | Rp 5.266.643.137,00 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | kabupaten Probolinggo | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 pegawai/bulan | Rp 5.259.143.137,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | kabupaten Probolinggo | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 pegawai/bulan | Rp 5.259.143.137,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | kabupaten Probolinggo | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Rp 7.500.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | kabupaten Probolinggo | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Rp 7.500.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | kabupaten Probolinggo | Persentase dokumen administrasi Kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | 87% | Rp 10.000.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | kabupaten Probolinggo | Persentase dokumen administrasi Kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | 87% | Rp 10.000.000,00 | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | kabupaten Probolinggo | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | 1 DOkumen | Rp 10.000.000,00 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | kabupaten Probolinggo | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | 1 DOkumen | Rp 10.000.000,00 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | kabupaten Probolinggo | Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD | 87% | Rp 73.000.000,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | kabupaten Probolinggo | Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD | 87% | Rp 73.000.000,00 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Rp 3.000.000,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Rp 3.000.000,00 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Rp 50.000.000,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Rp 50.000.000,00 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Rp 5.000.000,00 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Rp 5.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Rp 5.000.000,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Rp 5.000.000,00 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Rp 10.000.000,00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Rp 10.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | kabupaten Probolinggo | Persentase pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | 87% | Rp 1.029.932.231,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | kabupaten Probolinggo | Persentase pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | 87% | Rp 1.029.932.231,00 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | kabupaten Probolinggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Rp 105.518.750,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | kabupaten Probolinggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Rp 105.518.750,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | kabupaten Probolinggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Rp 924.413.481,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | kabupaten Probolinggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Rp 924.413.481,00 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | kabupaten Probolinggo | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 87% | Rp 22.000.000,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | kabupaten Probolinggo | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 87% | Rp 22.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | kabupaten Probolinggo | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | Rp 10.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | kabupaten Probolinggo | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | Rp 10.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | kabupaten Probolinggo | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | Rp 7.000.000,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | kabupaten Probolinggo | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | Rp 7.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | kabupaten Probolinggo | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Rp 5.000.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | kabupaten Probolinggo | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Rp 5.000.000,00 | |
| **2** | **Program Perencanaan Tenaga Kerja** | **kabupaten Probolinggo** | **Persentase Penyusunan dokumen rencana tenaga kerja (RTK)** | **37,5 %** | **Rp 100.000.000,00** | **Program Perencanaan Tenaga Kerja** | **kabupaten Probolinggo** | **Persentase Penyusunan dokumen rencana tenaga kerja (RTK)** | **37,5 %** | **Rp 100.000.000,00** | |
| | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | kabupaten Probolinggo | Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun | 100% | Rp 100.000.000,00 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | kabupaten Probolinggo | Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun | 100% | Rp 100.000.000,00 | |
| | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 Dokumen | Rp 100.000.000,00 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 Dokumen | Rp 100.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Program Hubungan Industrial** | **kabupaten Probolinggo** | **Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak** | **38%** | **Rp 3.865.185.600,00** | **Program Hubungan Industrial** | **kabupaten Probolinggo** | **Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak** | **38%** | **Rp 3.865.185.600,00** | |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama | 100% | Rp 76.000.000,00 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama | 100% | Rp 76.000.000,00 | |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | kabupaten Probolinggo | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 24 Perusahaan | Rp 10.000.000,00 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | kabupaten Probolinggo | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 24 Perusahaan | Rp 10.000.000,00 | |
| | Pendaftaran Perjanjian Kerja sama bagi Perusahaan | kabupaten Probolinggo | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 15 Perusahaan | Rp 10.000.000,00 | Pendaftaran Perjanjian Kerja sama bagi Perusahaan | kabupaten Probolinggo | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 15 Perusahaan | Rp 10.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek | 1 Laporan | Rp 56.000.000,00 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek | 1 Laporan | Rp 56.000.000,00 | |
| | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase Penyelesaian masalah hubungan industrial | 100% | Rp 3.789.185.600,00 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase Penyelesaian masalah hubungan industrial | 0% | Rp 3.789.185.600,00 | |
| | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 2 Perkara | Rp 10.000.000,00 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 2 Perkara | Rp 10.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 2 Perkara | Rp 10.000.000,00 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 2 Perkara | Rp 10.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | kabupaten Probolinggo | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | Rp 10.000.000,00 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | kabupaten Probolinggo | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | Rp 10.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 10 Lembaga | Rp 10.000.000,00 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 10 Lembaga | Rp 10.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | kabupaten Probolinggo | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerjadan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 25.215 orang | Rp 3.749.185.600,00 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | kabupaten Probolinggo | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerjadan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 25.215 orang | Rp 3.749.185.600,00 | |
| **4** | **Program Penempatan Tenaga Kerja** | **kabupaten Probolinggo** | **Persentase pencari kerja yang ditempatkan** | **45%** | **Rp 1.040.000.000,00** | **Program Penempatan Tenaga Kerja** | **kabupaten Probolinggo** | **Persentase pencari kerja yang ditempatkan** | **45%** | **Rp 1.040.000.000,00** | |
| | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja | 85% | Rp 873.500.000,00 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja | 85% | Rp 873.500.000,00 | |
| | Pelayanan antar Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 325 Orang | Rp 10.000.000,00 | Pelayanan antar Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 325 Orang | Rp 10.000.000,00 | |
| | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | 1000 Orang | Rp 10.000.000,00 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | 1000 Orang | Rp 10.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | kabupaten Probolinggo | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | 25 Orang | Rp 21.500.000,00 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | kabupaten Probolinggo | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | 25 Orang | Rp 21.500.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perluasan Kesempatan Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 1200rang | Rp 853.500.000,00 | Perluasan Kesempatan Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 1200rang | Rp 853.500.000,00 | |
| | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase LPTKS yang diberikan rekomendasi izin | 85% | Rp 20.000.000,00 | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase LPTKS yang diberikan rekomendasi izin | 85% | Rp 20.000.000,00 | |
| | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | kabupaten Probolinggo | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi | 15 Lembaga | Rp 10.000.000,00 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | kabupaten Probolinggo | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi | 15 Lembaga | Rp 10.000.000,00 | |
| | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | kabupaten Probolinggo | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku | 15 Lembaga | Rp 10.000.000,00 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | kabupaten Probolinggo | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku | 15 Lembaga | Rp 10.000.000,00 | |
| | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | kabupaten Probolinggo | Persentase informasi pasar kerja yang diberikan | 85% | Rp 70.000.000,00 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | kabupaten Probolinggo | Persentase informasi pasar kerja yang diberikan | 85% | Rp 70.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | kabupaten Probolinggo | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 1 Dokumen | Rp 10.000.000,00 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | kabupaten Probolinggo | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 1 Dokumen | Rp 10.000.000,00 | |
| | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | kabupaten Probolinggo | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 100 orang | Rp 10.000.000,00 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | kabupaten Probolinggo | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 100 orang | Rp 10.000.000,00 | |
| | Job Fair/Bursa Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja | 20 Orang | Rp 50.000.000,00 | Job Fair/Bursa Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja | 20 Orang | Rp 50.000.000,00 | |
| | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase perlindungan PMI yang diberikan | 85% | Rp 45.000.000,00 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase perlindungan PMI yang diberikan | 85% | Rp 45.000.000,00 | |
| | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | kabupaten Probolinggo | Jumlah Calon PMI dan PMI yang dilindungi dan meningkat kompetensinya | 50 Orang | Rp 15.000.000,00 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | kabupaten Probolinggo | Jumlah Calon PMI dan PMI yang dilindungi dan meningkat kompetensinya | 50 Orang | Rp 15.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | kabupaten Probolinggo | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | 50 Orang | Rp 15.000.000,00 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | kabupaten Probolinggo | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | 50 Orang | Rp 15.000.000,00 | |
| | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | kabupaten Probolinggo | Jumlah PMI Purna yang diberdayakan | 5 Orang | Rp 15.000.000,00 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | kabupaten Probolinggo | Jumlah PMI Purna yang diberdayakan | 5 Orang | Rp 15.000.000,00 | |
| | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase Perpanjangan IMTA yang diterbitkan | 100% | Rp 10.000.000,00 | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase Perpanjangan IMTA yang diterbitkan | 100% | Rp 10.000.000,00 | |
| | Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota | kabupaten Probolinggo | Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi | 6 SKRD | Rp 10.000.000,00 | Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota | kabupaten Probolinggo | Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi | 6 SKRD | Rp 10.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **kabupaten Probolinggo** | **Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan/kompetensi** | **81%** | **Rp 6.454.958.400,00** | **Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **kabupaten Probolinggo** | **Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan/kompetensi** | **81%** | **Rp 6.454.958.400,00** | |
| | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | kabupaten Probolinggo | Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi | 100% | Rp 6.414.958.400,00 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | kabupaten Probolinggo | Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi | 100% | Rp 6.414.958.400,00 | |
| | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | kabupaten Probolinggo | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 1232 orang | Rp 6.394.958.400,00 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | kabupaten Probolinggo | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 1232 orang | Rp 6.394.958.400,00 | |
| | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 10 Lembaga | Rp 10.000.000,00 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 10 Lembaga | Rp 10.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | 1 Unit | Rp 10.000.000,00 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | 1 Unit | Rp 10.000.000,00 | |
| | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | kabupaten Probolinggo | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina | 60% | Rp 10.000.000,00 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | kabupaten Probolinggo | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina | 60% | Rp 10.000.000,00 | |
| | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | kabupaten Probolinggo | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 10 Lembaga | Rp 10.000.000,00 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | kabupaten Probolinggo | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 10 Lembaga | Rp 10.000.000,00 | |
| | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | kabupaten Probolinggo | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | 60% | Rp 10.000.000,00 | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | kabupaten Probolinggo | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | 60% | Rp 10.000.000,00 | |
| | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | kabupaten Probolinggo | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | 10 Perizinan | Rp 10.000.000,00 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | kabupaten Probolinggo | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | 10 Perizinan | Rp 10.000.000,00 | |
| | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | kabupaten Probolinggo | Persentase Perusahaan Kecil yang difasilitasi bimbingan konsultasi | 85% | Rp 10.000.000,00 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | kabupaten Probolinggo | Persentase Perusahaan Kecil yang difasilitasi bimbingan konsultasi | 85% | Rp 10.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | kabupaten Probolinggo | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | 10 Perusahaan | Rp 10.000.000,00 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | kabupaten Probolinggo | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | 10 Perusahaan | Rp 10.000.000,00 | |
| | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase tenaga kerja yang diukur produktivitasnya | 12% | Rp 10.000.000,00 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Persentase tenaga kerja yang diukur produktivitasnya | 12% | Rp 10.000.000,00 | |
| | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 1 Dokumen | Rp 10.000.000,00 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 1 Dokumen | Rp 10.000.000,00 | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel 2.4 T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Probolinggo

OPD: Dinas Tenaga Kerja

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | Kabupaten Probolinggo | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | 79,73 | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kabupaten Probolinggo | Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 87,00% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 dokumen | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4 dokumen | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 dokumen | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 dokumen | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kabupaten Probolinggo | Persentase dokumen Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | 87,00% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 pegawai/ bulan | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kabupaten Probolinggo | Persentase dokumen administrasi Kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | 87,00% | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kabupaten Probolinggo | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | 1 DOkumen | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kabupaten Probolinggo | Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD | 87,00% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Probolinggo | Persentase pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | 87,00% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Probolinggo | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 87,00% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | |
| | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Kabupaten Probolinggo | Persentase Penyusunan dokumen rencana tenaga kerja (RTK) | 37,50% | |
| | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Kabupaten Probolinggo | Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun | 1,00 | |
| | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 Dokumen | |
| | Program Hubungan Industrial | Kabupaten Probolinggo | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | 37,50% | |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama | 100,00% | |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 24 Perusahaan | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pendaftaran Perjanjian Kerja sama bagi Perusahaan | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 15 Perusahaan | |
| | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek | 1 Laporan | |
| | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Persentase Penyelesaian masalah hubungan industrial | 100,00% | |
| | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 2 Perkara | |
| | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 2 Perkara | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | |
| | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 10 Lembaga | |
| | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Kabupaten Probolinggo | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerjadan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 25.215 orang | |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | Kabupaten Probolinggo | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | 45,00% | |
| | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja | 85,00% | |
| | Pelayanan antar Kerja | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 325 Orang | |
| | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | 1000 Orang | |
| | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | 25 Orang | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Perluasan Kesempatan Kerja | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 120 0rang | |
| | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Persentase LPTKS yang diberikan rekomendasi izin | 85,00% | |
| | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi | 15 Lembaga | |
| | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | Kabupaten Probolinggo | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku | 15 Lembaga | |
| | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Kabupaten Probolinggo | Persentase informasi pasar kerja yang diberikan | 85,00% | |
| | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 1 Dokumen | |
| | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 100 orang | |
| | Job Fair/Bursa Kerja | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja | 20 Orang | |
| | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Persentase perlindungan PMI yang diberikan | 85,00% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Calon PMI dan PMI yang dilindungi dan meningkat kompetensinya | 50 Orang | |
| | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Kabupaten Probolinggo | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | 50 Orang | |
| | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Kabupaten Probolinggo | Jumlah PMI Purna yang diberdayakan | 5 Orang | |
| | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Persentase Perpanjangan IMTA yang diterbitkan | 100,00% | |
| | Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi | 6 SKRD | |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Kabupaten Probolinggo | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan/kompetensi | 80,50% | |
| | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Kabupaten Probolinggo | Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi | 100,00% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 1232orang | |
| | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 10 Lembaga | |
| | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | 1 Unit | |
| | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Kabupaten Probolinggo | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina | 60,00% | |
| | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 10 Lembaga | |
| | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Kabupaten Probolinggo | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | 60,00% | |
| | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | 10 Perizinan | |
| | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Kabupaten Probolinggo | Persentase Perusahaan Kecil yang difasilitasi bimbingan konsultasi | 85,00% | |
| | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | 10 Perusahaan | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Persentase tenaga kerja yang diukur produktivitasnya | 12,00% | |
| | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 1 Dokumen | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional tentang Ketenagakerjaan di Indonesia diatur terutama oleh Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 (mengganti Perppu Cipta Kerja). Kebijakan ini meliputi pengaturan kontrak kerja, waktu kerja, pengupahan, perlindungan pekerja, serta penyediaan jaminan sosial dan program pelatihan kerja. Selain itu, kebijakan yang lebih spesifik diatur dalam peraturan Pemerintah dan Kementerian yang mengatur berbagai aspek seperti penggunaan tenaga kerja asing, penentuan upah minimum, dan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Tenaga Kerja mendukung Program Prioritas Nasional 6 (enam) Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan, dalam pelaksanaannya dapat tertuang pada program hubungan industrial yang kegiatannya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

## 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.2.1 Tujuan

Dinas Tenaga Kerja memiliki tujuan “Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif serta Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas”.

### 3.2.2 Sasaran

Sasaran Dinas Tenaga Kerja merupakan penjabaran dati tujuan yang Dinas Tenaga Kerja, adapun sasaran Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Disabilitas yang Bekerja di Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta.

## 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

### 3.3.1 Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Berikut adalah Program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Hubungan Industrial
3. Program Perencanaan Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### 3.3.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2026. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sebanyak 18 Kegiatan.

### 3.3.3 Sub Kegiatan

Sub kegiatan merupakan unit terkecil dalam struktur perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang memiliki keluaran (output) yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sub kegiatan berada di bawah kegiatan, dan merupakan komponen operasional yang langsung mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Probolinggo
Dinas Tenaga Kerja

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | kabupaten Probolinggo | 79,73 | Rp 6.424.075.368 | APBD | | 80,53 | Rp 6.495.500.000,00 |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | kabupaten Probolinggo | 87,00% | Rp 22.500.000 | APBD | | 87% | Rp 50.000.000,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | kabupaten Probolinggo | 4 dokumen | Rp 5.000.000 | APBD | | 4 dokumen | Rp 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | kabupaten Probolinggo | 4 dokumen | Rp 5.000.000 | APBD | | 4 dokumen | Rp 10.000.000,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | kabupaten Probolinggo | 4 dokumen | Rp 2.500.000 | APBD | | 4 dokumen | Rp 10.000.000,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | kabupaten Probolinggo | 4 dokumen | Rp 2.500.000 | APBD | | 4 dokumen | Rp 10.000.000,00 |
| | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | kabupaten Probolinggo | 1 Laporan | Rp 7.500.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 10.000.000,00 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | kabupaten Probolinggo | 87,00% | Rp 5.266.643.137 | APBD | | 0,87 | Rp 5.275.567.769,00 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | kabupaten Probolinggo | 32 pegawai/bulan | Rp 5.259.143.137 | APBD | | 32 pegawai/bulan | Rp 5.268.067.769,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | kabupaten Probolinggo | 1 Laporan | Rp 7.500.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 7.500.000,00 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase dokumen administrasi Kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | kabupaten Probolinggo | 87,00% | Rp 10.000.000 | APBD | | 87% | Rp 10.000.000,00 |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | kabupaten Probolinggo | 1 DOkumen | Rp 10.000.000 | APBD | | 1 DOkumen | Rp 10.000.000,00 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD | kabupaten Probolinggo | 87,00% | Rp 73.000.000 | APBD | | 87% | Rp 90.000.000,00 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | kabupaten Probolinggo | 1 Paket | Rp 3.000.000 | APBD | | 1 Paket | Rp 10.000.000,00 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | kabupaten Probolinggo | 1 Paket | Rp 50.000.000 | APBD | | 1 Paket | Rp 50.000.000,00 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | kabupaten Probolinggo | 1 Paket | Rp 5.000.000 | APBD | | 1 Paket | Rp 10.000.000,00 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | kabupaten Probolinggo | 1 Paket | Rp 5.000.000 | APBD | | 1 Paket | Rp 10.000.000,00 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | kabupaten Probolinggo | 2 Paket | Rp 10.000.000 | APBD | | 2 Paket | Rp 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | kabupaten Probolinggo | 87,00% | Rp 1.029.932.231 | APBD | | 87% | Rp 1.039.932.231,00 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | kabupaten Probolinggo | 1 Laporan | Rp 105.518.750 | APBD | | 1 Laporan | Rp 115.518.750,00 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | kabupaten Probolinggo | 1 Laporan | Rp 924.413.481 | APBD | | 1 Laporan | Rp 924.413.481,00 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | kabupaten Probolinggo | 87,00% | Rp 22.000.000 | APBD | | 87% | Rp 30.000.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | kabupaten Probolinggo | 2 Unit | Rp 10.000.000 | APBD | | 2 Unit | Rp 10.000.000,00 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | kabupaten Probolinggo | 3 Unit | Rp 7.000.000 | APBD | | 3 Unit | Rp 10.000.000,00 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | kabupaten Probolinggo | 1 Unit | Rp 5.000.000 | APBD | | 1 Unit | Rp 10.000.000,00 |
| | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase Penyusunan dokumen rencana tenaga kerja (RTK) | kabupaten Probolinggo | 37,50% | Rp 100.000.000 | APBD | | 38,00 % | Rp 110.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun | kabupaten Probolinggo | 1,00 | Rp 100.000.000 | APBD | | 100% | Rp 110.000.000,00 |
| | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | kabupaten Probolinggo | 1 Dokumen | Rp 100.000.000 | APBD | | 1 Dokumen | Rp 110.000.000,00 |
| | Program Hubungan Industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | kabupaten Probolinggo | 37,50% | Rp 3.865.185.600 | APBD | | 38,00 % | Rp 3.899.300.000,00 |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama | kabupaten Probolinggo | 100% | Rp 76.000.000 | APBD | | 100% | Rp 76.000.000,00 |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | kabupaten Probolinggo | 24 Perusahaan | Rp 10.000.000 | APBD | | 24 Perusahaan | Rp 10.000.000,00 |
| | Pendaftaran Perjanjian Kerja sama bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | kabupaten Probolinggo | 15 Perusahaan | Rp 10.000.000 | APBD | | 15 Perusahaan | Rp 10.000.000,00 |
| | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek | kabupaten Probolinggo | 1 Laporan | Rp 56.000.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 56.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian masalah hubungan industrial | kabupaten Probolinggo | 100% | Rp 3.789.185.600 | APBD | | 100% | Rp 3.823.300.000,00 |
| | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | kabupaten Probolinggo | 2 Perkara | Rp 10.000.000 | APBD | | 2 Perkara | Rp 10.000.000,00 |
| | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | kabupaten Probolinggo | 2 Perkara | Rp 10.000.000 | APBD | | 2 Perkara | Rp 10.000.000,00 |
| | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | kabupaten Probolinggo | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | Rp 10.000.000 | APBD | | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | Rp 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | kabupaten Probolinggo | 10 Lembaga | Rp 10.000.000 | APBD | | 10 Lembaga | Rp 10.000.000,00 |
| | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerjadan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | kabupaten Probolinggo | 25.215 orang | Rp 3.749.185.600 | DBHCHT | | 25.215 orang | Rp 3.783.300.000,00 |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | kabupaten Probolinggo | 45,00% | Rp 1.040.000.000 | APBD | | 50,00 % | Rp 1.029.600.000,00 |
| | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja | kabupaten Probolinggo | 85,00% | Rp 873.500.000 | APBD | | 85,00 % | Rp 884.600.000,00 |
| | Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | kabupaten Probolinggo | 325 Orang | Rp 10.000.000 | APBD | | 350 Orang | Rp 10.000.000,00 |
| | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | kabupaten Probolinggo | 1000 Orang | Rp 10.000.000 | APBD | | 1000 Orang | Rp 10.000.000,00 |
| | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | kabupaten Probolinggo | 25 Orang | Rp 21.500.000 | APBD | | 30 Orang | Rp 22.000.000,00 |
| | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | kabupaten Probolinggo | 120 0rang | Rp 853.500.000 | APBD | | 120 orang | Rp 864.600.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase LPTKS yang diberikan rekomendasi izin | kabupaten Probolinggo | 85,00% | Rp 20.000.000 | APBD | | 85,00 % | Rp 20.000.000,00 |
| | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi | kabupaten Probolinggo | 15 Lembaga | Rp 10.000.000 | APBD | | 15 Lembaga | Rp 10.000.000,00 |
| | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku | kabupaten Probolinggo | 15 Lembaga | Rp 10.000.000 | APBD | | 15 Lembaga | Rp 10.000.000,00 |
| | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Persentase informasi pasar kerja yang diberikan | kabupaten Probolinggo | 85,00% | Rp 70.000.000 | APBD | | 85,00 % | Rp 70.000.000,00 |
| | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | kabupaten Probolinggo | 1 Dokumen | Rp 10.000.000 | APBD | | 1 Dokumen | Rp 10.000.000,00 |
| | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | kabupaten Probolinggo | 100 orang | Rp 10.000.000 | APBD | | 100 orang | Rp 10.000.000,00 |
| | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja | kabupaten Probolinggo | 20 Orang | Rp 50.000.000 | APBD | | 20 Orang | Rp 50.000.000,00 |
| | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perlindungan PMI yang diberikan | kabupaten Probolinggo | 85,00% | Rp 45.000.000 | APBD | | 85,00 % | Rp 45.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah Calon PMI dan PMI yang dilindungi dan meningkat kompetensinya | kabupaten Probolinggo | 50 Orang | Rp 15.000.000 | APBD | | 50 Orang | Rp 15.000.000,00 |
| | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | kabupaten Probolinggo | 50 Orang | Rp 15.000.000 | APBD | | 50 Orang | Rp 15.000.000,00 |
| | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Jumlah PMI Purna yang diberdayakan | kabupaten Probolinggo | 5 Orang | Rp 15.000.000 | APBD | | 5 Orang | Rp 15.000.000,00 |
| | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perpanjangan IMTA yang diterbitkan | kabupaten Probolinggo | 100% | Rp 10.000.000 | APBD | | 100% | Rp 10.000.000,00 |
| | Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi | kabupaten Probolinggo | 6 SKRD | Rp 10.000.000 | APBD | | 6 SKRD | Rp 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan/kompetensi | kabupaten Probolinggo | 80,50% | Rp 6.454.958.400 | APBD | | 81,00 % | Rp 6.526.700.000,00 |
| | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi | kabupaten Probolinggo | 1,00 | Rp 6.414.958.400 | APBD | | 100% | Rp 6.486.700.000,00 |
| | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | kabupaten Probolinggo | 1232orang | Rp 6.394.958.400 | APBD | | 1232 orang | Rp 6.466.700.000,00 |
| | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | kabupaten Probolinggo | 10 Lembaga | Rp 10.000.000 | APBD | | 10 Lembaga | Rp 10.000.000,00 |
| | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | kabupaten Probolinggo | 1 Unit | Rp 10.000.000 | APBD | | 1 Unit | Rp 10.000.000,00 |
| | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina | kabupaten Probolinggo | 60,00% | Rp 10.000.000 | APBD | | 70,00 % | Rp 10.000.000,00 |
| | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | kabupaten Probolinggo | 10 Lembaga | Rp 10.000.000 | APBD | | 10 Lembaga | Rp 10.000.000,00 |
| | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | kabupaten Probolinggo | 60,00% | Rp 10.000.000 | APBD | | 70,00 % | Rp 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | kabupaten Probolinggo | 10 Perizinan | Rp 10.000.000 | APBD | | 10 Perizinan | Rp 10.000.000,00 |
| | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Persentase Perusahaan Kecil yang difasilitasi bimbingan konsultasi | kabupaten Probolinggo | 85,00% | Rp 10.000.000 | APBD | | 85,00 % | Rp 10.000.000,00 |
| | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | kabupaten Probolinggo | 10 Perusahaan | Rp 10.000.000 | APBD | | 10 Perusahaan | Rp 10.000.000,00 |
| | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase tenaga kerja yang diukur produktivitasnya | kabupaten Probolinggo | 12,00% | Rp 10.000.000 | APBD | | 15,00 % | Rp 10.000.000,00 |
| | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | kabupaten Probolinggo | 1 Dokumen | Rp 10.000.000 | APBD | | 1 Dokumen | Rp 10.000.000,00 |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Probolinggo yang harus diselaraskan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah:

**Unsur Tenaga Kerja**

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

**5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**II Program Perencanaan Tenaga Kerja**

**1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

**III Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**

**1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

**2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

**3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**

- Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi

**4. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**

- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

**5. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

**IV Program Penempatan Tenaga Kerja**

**1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**

- Pelayanan antar Kerja
- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- Perluasan Kesempatan Kerja

**2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi
- Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

**3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**

- Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- Job Fair/Bursa Kerja

**4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**

- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

**5. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

**V Program Hubungan Industrial**

**1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan

- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

**2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tahun 2026

| No. | RENJA PD TAHUN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan** | **Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan** | **Target Kinerja** | **Pagu Indikatif** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan/kompetensi | 80,5% | 6.454.958.400,00 |
| | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi | 100% | 6.454.958.400,00 |
| | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 1232 orang | 6.454.958.400,00 |
| | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | | |
| | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | | |
| | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina | | |
| | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | | |
| | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | | |
| | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | |
| | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Persentase Perusahaan Kecil yang difasilitasi bimbingan konsultasi | | |
| | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Produktivitas | | |
| | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase tenaga kerja yang diukur produktivitasnya | | |
| | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | | |
| | Program Hubungan Industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | 37,5% | 3.965.185.600,00 |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama | 100% | 65.000.000,00 |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | | |
| | Pendaftaran Perjanjian Kerja sama bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | | |
| | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek | 1 Laporan | 65.000.000,00 |
| | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian masalah hubungan industrial | 100% | 3.900.185.600,00 |
| | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 2 Perkara | 15.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | | |
| | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | | |
| | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | | |
| | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerjadan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 25.215 orang | 3.885.185.600,00 |
| | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase Penyusunan dokumen rencana tenaga kerja (RTK) | | |
| | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun | | |
| | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | | |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | 45,00% | 1.040.000.000,00 |
| | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja | 85 % | 1.020.000.000,00 |
| | Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | | |
| | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | 1000 Orang | 10.000.000,00 |
| | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | 25 Orang | 10.000.000,00 |
| | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui | 225 Orang | 1.000.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | program Perluasan Kesempatan Kerja | | |
| | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase LPTKS yang diberikan rekomendasi izin | | |
| | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi | | |
| | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku | | |
| | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Persentase informasi pasar kerja yang diberikan | | |
| | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | |
| | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | | |
| | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja | | |
| | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perlindungan PMI yang diberikan | 85% | 20.000.000,00 |
| | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah Calon PMI dan PMI yang dilindungi dan meningkat kompetensinya | 50 Orang | 20.000.000,00 |
| | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | | |
| | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Jumlah PMI Purna yang diberdayakan | | |
| | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja | Persentase Perpanjangan IMTA yang diterbitkan | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | 79,73 | 6.424.075.367,50 |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 87% | 22.500.000,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 dokumen | 7.500.000,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4 dokumen | 7.500.000,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | |
| | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 7.500.000,00 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen Administrasi Keuangan | 87% | 5.266.643.137,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PD yang dilaporkan tepat waktu | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 pegawai/bulan | 5.259.143.137,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 7.500.000,00 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase dokumen administrasi Kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD | 87% | 72.500.000,00 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.500.000,00 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 50.000.000,00 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 5.000.000,00 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.000.000,00 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 10.000.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | 87% | 1.039.932.230,50 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 115.518.750,00 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan | 924.413.480,50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | yang Disediakan | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 87% | 22.500.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 22.500.000,00 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | |
| | **Total** | | | **17.884.219.367,50** |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Renja ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang Ketenagakerjaan.

Melalui Renja ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja secara berkelanjutan. Pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan prioritas Pembangunan Daerah serta mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, baik dari instansi Pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami membuka ruang kolaborasi dan komunikasi yang konstruktif demi tercapainya tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan.

Akhirnya, semoga Renja ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor Ketenagakerjaan.

Probolinggo, 18 September 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO

**dr. ANANG BUDI YOELIJANTO., M.M.Kes., MMRS**
Pembina Utama Muda
NIP. 19670707 199703 1 004

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Renja ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang Ketenagakerjaan.

Melalui Renja ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja secara berkelanjutan. Pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan prioritas Pembangunan Daerah serta mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, baik dari instansi Pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami membuka ruang kolaborasi dan komunikasi yang konstruktif demi tercapainya tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan.

Akhirnya, semoga Renja ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor Ketenagakerjaan.

Probolinggo, 18 September 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO

**dr. ANANG BUDI YOELIJANTO., M.M.Kes., MMRS**
Pembina Utama Muda
NIP. 19670707 199703 1 004



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 2026
TANGGAL : 2026

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Probolinggo, sehingga Renja Perangkat Daerah juga harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD 2026 menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan pada hakikatnya harus dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Program pembangunan di daerah harus dapat meningkatkan ekonomi daerah sehingga daerah mandiri dan mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu

pembangunan daerah haruslah melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam seluruh tahapannya, sehingga Pemerintah Daerah akan mendapatkan dukungan sinergis dari rakyat dalam melakukan perubahan di segala bidang guna mengatasi dan merespon berbagai permasalahan dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, faktor perencanaan memainkan peranan penting dalam upaya mensukseskan pembangunan di berbagai tingkatan baik nasional maupun daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo memliliki prioritas sasaran dalam Pembangunan Daerah sesuai dengan RPJMD. Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan.
3. Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Renja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan memberikan perhatian penting pada kualitas proses

penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan *review* berkala atas implementasinya.

Demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan *stakeholder* di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai *stakeholder* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Renstra lima tahunan Perangkat Daerah, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Renja tahunan Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo menyusun Renja tahun 2026.

Dalam perjalanan waktu bisa terjadi perkembangan yang menyebabkan Renja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan keadaan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam pasal 343 ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah

dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, maka diamanatkan bagi Perangkat Daerah untuk memenuhi ketentuan dimaksud, diantaranya dengan menambah/mengurangi/menggeser anggaran disesuaikan dengan ketentuan dimaksud.

Atas hal tersebut, dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 disamping berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029, juga diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu memuat pula keterangan, antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo. Adapun indikator rencana kinerja meliputi sasaran, program dan kegiatan.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 18 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2023 Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 adalah sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja-PD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 adalah :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Memberikan gambaran kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan misinya untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi;

3. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo serta indikator atau ukuran keberhasilan/kegagalan pada tahun 2026;
4. Memberikan arah/acuan dalam penyusunan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2026.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang latar belakang Renja DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan landasan hukum dalam penyusunan Renja DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Menggambarkan kajian terhadap hasil evaluasi Renja DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Tahun 2026

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 setelah Renja untuk mencapai tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo

BAB IV : PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

# BAB II
# EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Penduduk,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Penduduk,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Berikut hasil capaian kinerja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Penduduk,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

Selain itu program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Penduduk,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Adapun kendala–kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 antara lain Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2025.

1. Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menyebabkan adanya pengurangan belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas sebesar 50%, dan membatasi kegiatan studi banding, pencetakan, serta *focus group discussion*. Efisiensi belanja tersebut bertujuan untuk memfokuskan alokasi anggaran untuk pelayanan publik.

2.1. Realisasi Program dan Kegiatan

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II (Juni 2025) dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.1**
**Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo s/d Triwulan II (Juni 2025)**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan *(output)* | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1 | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase organisasi perempuan yang aktif | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 100% | 50 % | 50 % | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 93% | 50 % | 50 % | 93% |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 93% | 1 dokumen | 1 dokumen | 93% |
| | | | | Pemberdayaan PerempuanBidang Politik, Hukum,Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 72% | 100 % | 100 % | 72% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 90,47% | 2 dokumen | 2 dokumen | 90,47% |
| | | | | Advokasi Kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 organisasi | 2 organisasi | 2 organisasi | 2 organisasi | 100% | 2 organisasi | 2 organisasi | 100% |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 34,66% | 100 % | 100 % | 34,66% |
| | | | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga yang terlibat dalam jejaring pencegahan kekerasan kepada perempuan | 11 lembaga | 11 lembaga | 11 lembaga | 11 lembaga | 34,66% | 11 lembaga | 11 lembaga | 34,66% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 lembaga | 11 lembaga | 11 lembaga | 11 lembaga | 1 | 11 lembaga | 11 lembaga | 1 |
| | | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Permasalahan keluarga yang terselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 |
| | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan | 20 lembaga | 20 lembaga | 20 lembaga | 20 lembaga | 100 % | 20 lembaga | 20 lembaga | 100 % |
| | | | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase kebutuhan data gender dan anak yang ter-update/terpenuhi | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 % | 50 | 50 | 100 % |
| | | | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang telah menyediakan data gender dan atau anak | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 % | 50 | 50 | 100 % |
| | | | | Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan Kab/kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 100 % | 1 dok | 1 dok | 100 % |
| | | | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak | 28,5 % | 28,5 % | 28,5 % | 28,5 % | 28,5 % | 28,5 % | 28,5 % | 28,5 % |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak | 94 desa/keluraha n | 94 desa/kelurah an | 94 desa/kelura han | 94 desa/kelura han | 94 desa/kel urahan | 94 desa/kelurahan | 94 desa/kelurah an | 94 desa/kelurah an |
| | | | | Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak | 50 org | 50 org | 50 org | 50 org | 50 | 50 org | 50 org | 50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | 150 org | 150 org | 150 org | 150 org | 150 | 150 org | 150 org | 150 |
| | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| | | | | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK | 1 org | 1 org | 1 org | 1 org | 1 | 1 org | 1 org | 1 |
| | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP PD | 82 nilai | 82 nilai | 82 nilai | 82 nilai | 82 | 82 nilai | 82 nilai | 82 |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan | 6 dok | 6 dok | 6 dok | 6 dok | 6 | 6 dok | 6 dok | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Perangkat Daerah | evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | | | | | | | | |
| | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 dok | 10 dok | 10 dok | 10 dok | 10 | 10 dok | 10 dok | 10 |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | 12 dok | 12 dok | 12 dok | 12 dok | 12 | 12 dok | 12 dok | 12 |
| | | | | Penyediaan Gaji danTunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 org | 31 org | 31 org | 31 org | 31 | 31 org | 31 org | 31 |
| | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dok | 12 dok | 12 dok | 12 dok | 12 | 12 dok | 12 dok | 12 |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | 12 dok | 12 dok | 12 dok | 12 dok | 12 | 12 dok | 12 dok | 12 |
| | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 dok | 12 dok | 12 dok | 12 dok | 12 | 12 dok | 12 dok | 12 |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase pemenuhan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 | 100 % | 100 % | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | administrasi umum PD | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 | 2 paket | 2 paket | 2 |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 paket | 5 paket | 5 paket | 5 paket | 5 | 5 paket | 5 paket | 5 |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 | 2 paket | 2 paket | 2 |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | 3 paket | 3 paket | 3 paket | 100% | 3 paket | 3 paket | 100% |
| | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 100% | 2 paket | 2 paket | 100% |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 12 laporan | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SKPD | | | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 100% | 10 unit | 10 unit | 100% |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 12 laporan | 100% |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 12 laporan | 100% |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 12 laporan | 100% |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 1508 unit | 1508 unit | 1508 unit | 1508 unit | 100% | 1508 unit | 1508 unit | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 25 unit | 25 unit | 25 unit | 25 unit | 100% | 25 unit | 25 unit | 100% |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 25 unit | 25 unit | 25 unit | 25 unit | 100% | 25 unit | 25 unit | 100% |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 unit | 40 unit | 40 unit | 40 unit | 100% | 40 unit | 40 unit | 100% |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 100% | 4 unit | 4 unit | 100% |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 100% | 2 unit | 2 unit | 100% |
| 3 | | | | Program Pengendalian Penduduk | Persentase penurunan ASFR | 65 % | 65 % | 65 % | 65 % | 100% | 65 % | 65 % | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Persentase Program Berwawasan Kependudukan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100% |
| | | | | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 3 satuan pendidikan | 3 satuan pendidikan | 3 satuan pendidikan | 3 satuan pendidikan | 100% | 3 satuan pendidikan | 3 satuan pendidikan | 100% |
| | | | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penurunan angka kelahiran pada remaja 15-19 tahun (ASFR) | 65 % | 65 % | 65 % | 65 % | 100% | 65 % | 65 % | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | | | | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga | 24 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 100% | 24 Laporan | 24 Laporan | 100% |
| 2 | | | | Pogram Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Menurunnya TFR | 1,7 Nilai | 1,7 Nilai | 1,7 Nilai | 1,7 Nilai<br>40 %<br>85 %<br>5,3 % | 100% | 1,7 Nilai<br>40 %<br>85 %<br>5,3 % | 1,7 Nilai | 100%<br>100%<br>100%<br>100% |
| | | | | | Persentase Kampung KB dengan Strata Berkembang | 40 % | 40 % | 40 %<br>85 %<br>5,3 % | | 100% | | 40 %<br>85 %<br>5,3 % | |
| | | | | | Prevalensi peserta KB Aktif | 85 % | 85 % | | | 100% | | | |
| | | | | | Unmetneed | 5,3 % | 5,3 % | | | 100% | | | |
| | | | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase Pendewasaan Usia Pernikahan | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 100% | 32 % | 32 % | 100% |
| | | | | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 24 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 100% | 24 Laporan | 24 Laporan | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 24 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 100% | 24 Laporan | 24 Laporan | 100% |
| | | | | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Prosentase IMP Berkembang | 8,6 % | 8,6 % | 8,6 % | 8,6 % | 100% | 8,6 % | 8,6 % | 100% |
| | | | | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1320 orang | 1320 orang | 1320 orang | 1320 orang | 100% | 1320 orang | 1320 orang | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 5 organisasi | 5 organisasi | 5 organisasi | 5 organisasi | 100% | 5 organisasi | 5 organisasi | 100% |
| | | | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan ke fasilitas Pelayanan Kesehatan | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 100% | 85 % | 85 % | 100% |
| | | | | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 56 Laporan | 56 Laporan | 56 Laporan | 56 Laporan | 100% | 56 Laporan | 56 Laporan | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Persentase kampung KB yang mendapat pelayananan dan pembinaan kesertaan ber-KB | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 100% | 85 % | 85 % | 100% |
| | | | | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | 150 Laporan | 150 Laporan | 150 Laporan | 150 Laporan | 100% | 150 Laporan | 150 Laporan | 100% |
| | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Persentase Anggota Keluarga TRIBINA, UPPKS DAN PIK-R/M yang aktif | 330 Kelompok Kegiatan | 330 Kelompok Kegiatan | 330 Kelompok Kegiatan | 330 Kelompok Kegiatan | 100% | 330 Kelompok Kegiatan | 330 Kelompok Kegiatan | 100% |
| | | | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | 330 Kelompok Kegiatan | 330 Kelompok Kegiatan | 330 Kelompok Kegiatan | 330 Kelompok Kegiatan | 100% | 330 Kelompok Kegiatan | 330 Kelompok Kegiatan | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 330 Organisasi | 330 Organisasi | 330 Organisasi | 330 Organisasi | 100% | 330 Organisasi | 330 Organisasi | 100% |

Dari Tabel 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum penyerapan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tahun 2025 baru terealisasi 31,40 % dari seluruh anggaran tersedia, hal ini disebabkan :

- Merupakan upaya konsistensi sehingga anggaran yang dialokasikan diserap berdasarkan kebutuhan riil kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan ;
- Tertundanya sebagian kegiatan karena terpetakannya jadwal kegiatan dalam pencapaian target kinerja pada triwulan II.

Sehubungan dengan hal diatas, pengelolaan program / kegiatan dan pembinaan SDM serta ketersediaan sarana/prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. harus diupayakan untuk lebih ditingkatkan, lebih terencana dan sistematis sehingga target kinerja Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Analisis kinerja Pelayanan ini merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berikut tabel 2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

# TC-30
## Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

| NO | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2024 | Tahun 2025 (Semester I) | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Indeks Pembangunan Gender | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,442 | 0,438 | 0,435 | | | 0,438 | 0,435 | |
| | | | Indeks Perlindungan Anak | 60,72 | 61,45 | 62,18 | | | 61,45 | 62,18 | |
| | | | Indeks Kualitas Keluarga (IKK) | 79,81 | 80,81 | 81,94 | | | 80,81 | 81,94 | |
| 2 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | | TFR (Angka Kelahiran Total) | 2,02 | 2,02 | 2,02 | | | 2,02 | 2,02 | |
| | | | ASFR 15 - 19 tahun | 52 | 51,5 | 51 | | | 51,5 | 51 | |
| | | | I - bangga | 61,19 | 63,08 | 64,98 | | | 63,08 | 64,98 | |
| | | | IPBK | 63,6 | 65,6 | 67,5 | | | 65,6 | 67,5 | |
| | | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 70,22 | 71,51 | 72,8 | | | 71,51 | 72,8 | |
| | | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 3,5 | 3,4 | 3,3 | | | 3,4 | 3,3 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Proporsi kebutuhan kb yang terpenuhi (demand satisfied) | 98,6 | 98,6 | 98,7 | | | 98,6 | 98,7 | |
| | | | Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri | 22,7 | 35,74 | 42,64 | | | 35,74 | 42,64 | |
| | | | Persentase kehamilan tidak direncanakan | 11,00 | 10,00 | 9,00 | | | 10,00 | 9,00 | |
| | | | Persentase keluarga yg mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga | 53,82 | 55,32 | 56,82 | | | 55,32 | 56,82 | |
| | | | Indeks lansia berdaya | 60,2 | 60,321 | 62,6 | | | 60,321 | 62,6 | |

## 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo sangat diperlukan adanya Sumber daya manusia dan asset yang berupa Peralatan dan Perlengkapan.

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo terdiri dari Pejabat Esellon III B sebanyak 4 orang , esselon IV a sebanyak 5 orang, Staf 38 orang ( PNS sebanyak 26 orang, PPPK sebanyak 1 orang, dan pegawai tidak tetap 11 orang), tenaga fungsional pegawai tidak tetap sebanyak / PLKB 18 orang. Untuk tenaga fungsional PKB mulai Januari tahun 2018 sudah diambil alih oleh pemerintah pusat bukan kewenangan daerah lagi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, susunan organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo terdiri dari :

1. Kepala Dinas 1 (satu) orang
2. Sekretaris Dinas 1 (satu) orang, yang membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:
   a. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda;
   b. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda;
   c. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda;
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
   a. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda;
   b. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda;
   c. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda;



5 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
   a. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda;

b. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda;

c. Penyuluh Sosial Muda;

6. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana keinginan masyarakat.

***2.*** **Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya usia perkawinan pertama perempuan di Kabupaten Probolinggo (di bawah 20 tahun)
2. Ada kecenderungan TFR di Kabupaten Probolinggo naik
3. Kesetaraan gender dalam pemakaian kontrasepsi belum baik, dimana kesertaan ber KB pria di Probolinggo masih rendah
4. Masih tingginya jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di Kabupaten Probolinggo 54,36 % pada Tahun 2014
5. Masih terdapat kasus kegagalan dan komplikasi akibat pemakaian kontrasepsi akan berpengaruh kepada calon akseptor, untuk itu konseling dan kualitas pelayanan perlu ditingkatkan
6. Adanya implementasi kebijakan baru pengelolaan program KB era JKN
7. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan
8. Masih kurangnya pengetahuan tentang perlindungan perempuan dan anak pada masyarakat

**3. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**a. Tantangan**

Secara luas tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Perangkat Daerah termasuk dalam hal-hal sebagai berikut :



1. Pelayanan Keluarga Berencana.

Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja yang

berkualitas bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga berkualitas. Tantangan kedepan adalah membangun keluarga kecil berkualitas terutama pada keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah.

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat terlaksana sesuai dengan rencana maka perlu terus ditingkatkan sinergi kebijakan dalam Pembangunan Kependudukan dan KB baik di pusat maupun Kabupaten.

2. Peningkatan Ketahanan Keluarga.

   Peningkatan Ketahanan Keluarga dilakukan melalui :

   a) Meningkatkan akses informasi dan pelayanan dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, melalui penggunaan internet dengan memanfaatkan fasilitas web site yang telah ada baik web site Pusat, Provinsi maupun Kabupaten untuk menginformasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya serta hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan sehingga masyarakat dapat langsung mengakses informasi tersebut. Tantangan kedepan, kepada PLKB sebagai ujung tombak dari pelaksanaan program di lapangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat maupun PD lain yang membutuhkan informasi tersebut dalam pelaksanaan tugasnya.

   b) Mengembangkan kualitas dan kuantitas kelompok Tri Bina (BKB. BKR, dan BKL). Data perkembangan BKB, BKR, dan BKL kedepan dituntut kevalitannya, keakuratannya dan ketepatan waktu penyajiannya. Hal ini terkait dengan sasaran program dan kegiatan kepada kelompok Bina Keluarga yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pembinaan, sehingga dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

   c) Meningkatkan kerjasama dengan Perban-kan dan mitra usaha lainnya dalam menyelenggarakan pendampingan dan mengali sumber dana/modal. Tantangan kedepan dalam peningkatan ketahanan keluarga adalah prioritas pembelajaran kewirausahaan khususnya Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi (KS 1 Alek) sehingga Keluarga tersebut mampu mencukupi kebutuhan minimal papan, makan dan sandang sendiri.

   d) Mengembangkan penggunaan Alat Teknologi Tepat Guna bagi kelompok UPPKS. Kedepan kelompok UPPKS diberikan pelatihan dalam rangka pengembangan Alat Teknologi Tepat Guna, baik dibidang industri kecil maupun bidang pertanian.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan hak anak

a) Terkait dengan pemberdayaan perempuan sampai saat ini belum maksimal pengelolaannya, mengingat komposisi penduduk pada tahun 2010 berdasarkan hasil dari Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Probolinggo penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki dengan posisi 476.573 orang penduduk perempuan dan 452.114 orang penduduk laki-laki. Hal ini apabila diberdayakan perempuan akan menjadi modal dalam pembangunan, yang bisa dimulai dari pemberdayaan perempuan dalam keluarga sampai ke semua bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga di bidang perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan perlu adanya perencanaan yang responsif gender pada semua PD, yang harus secepatnya dimulai dari tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Probolinggo. Rencana tersebut hanya akan bisa terwujud dengan adanya komitmen yang kuat serta koordinasi antara pemegang kendali kebijakan daerah dengan pelaksana kebijakan.

b) Masih adanya kasus tindak kekerasan berupa kasus KDRT, kasus kekerasan terhadap anak dan kasus kekerasan seksual pada anak perempuan, yang belum mendapatkan penanganan secara optimal, Kedepan tantangan yang harus dihadapi terkait dengan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan adalah meningkatkan pemahaman peraturan perundang-udangan tentang perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan kepada masyarakat dan menerbitkan produk hukum tentang penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Probolinggo dengan melibatkan stakeholder terkait. Hal ini diharapkan mampu menekan sekecil mungkin kasus tersebut;

c) Belum terkoordinasinya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di semua SOPD;

d) Belum memadainya perumusan, penerapan kebijakan dan tindakan khusus bagi upaya penegakan hukum serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**b. Peluang**

Dari tantangan yang harus dihadapi maka peluang yang ada harus diambil dalam upaya pengembangan pelayanan PD, beberapa peluang yang ada terkait dengan hal tersebut diantaranya adalah :

1. Peningkatan kompetensi provider bagi Bidan dan Dokter melalui pelatihan klinis IUD dan Implant serta pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan pemberian informed consent sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat di klinik KB Pemerintah dan Swasta.
2. Peran Tokoh Masyarakat (Tomas) dan Tokoh Agama (Toga).

Dukungan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai panutan dan berpengaruh dimasyarakat dapat melakukan advokasi dan KIE program Badan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

a) Melakukan Advokasi dan KIE terhadap pelayanan KB bermutu, pelaksanaan promosi dan konseling KB di tempat pelayanan
b) Melakukan Advokasi dan KIE terhadap pengelolaan kegiatan UPPKS
c) Melakukan Advokasi dan KIE terhadap kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL

3. Pemanfaatan secara maksimal hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang KB berupa pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB serta Bantuan Operasional KB untuk meningkatkan kualitas pelayanan PD.
4. Kepuasan Masyarakat perlu ditingkatkan, artinya masyarakat merasa puas sebelum maupun setelah mendapat pelayanan Kontrasepsi karena mendapatkan konseling dan pelayanan yang prima dari petugas
5. Adanya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) sampai tingkat RT, artinya ada suatu wadah pengelolaan dan pelaksanaan program Keluarga Berencana berupa IMP di tingkat Desa/Kelurahan, dusun/RW/RT yang membantu dalam program Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD), Sub-PPKBD, Kelompok KKBS RT dan kelompok-kelompok kegiatan (Poktan) yang merupakan bagian dari kegiatan kelompok KKBS RT
6. Komitmen mitra kerja dengan lintas sektoral, Swasta, LSM dan masyarakat diharap menunjang dan mendukung tercapainya Target/PPM program Dinas P3AP2KB dengan memanfaatkan kegiatan– kegiatan/Momentum-Momentum yang ada, antara lain :
   a) Manunggal TNI – KB – Kes, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Probolinggo untuk memenuhi tercapainya Target/PPM Bersama-sama dengan TNI dan Dinas Kesehatan
   b) Kesatuan Gerak PKK – KB – Kes
   c) Hari jadi Kabupaten Probolinggo
   d) Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
7. Sifat gotong-royong masyarakat dan kepeduliannya terhadap kasus tindak kekerasaan yang dapat dilihat dari adanya laporan dari masyarakat yang masuk merupakan peluang yang harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan sinergi antara pelayanan terpadu dengan masyarakat luas untuk menghapuskan tindak kekerasan dan menolong korban-korban yang memerlukan.

8. Berdasarkan data dan fakta tentang kondisi perempuan dan anak, terutama yang berkaitan dengan isu perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, pengabaian dan penelantaran, masih ada peluang untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban kekerasan, melalui komitmen yang kuat dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

**4. Isu-Isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Beberapa Isu-isu strategis yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut :

1) Kecenderungan TFR di Kabupaten Probolinggo meningkat tiap tahunnya
2) Meningkatnya Usia kawin pertama (UKP) perempuan di Kabupaten Probolinggo dari 17 Tahun menjadi 20 Tahun. Perkawinan Dini
3) Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) cara moderen dari 59.61 persen (SDKI 2007) menjadi 70 persen.
4) Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (*unmeet need*) dari 8 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 5 persen dari jumlah pasangan usia subur.
5) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan perempuan melalui peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan. Ketimpangan Gender
6) Menurunnya angka Kekerasan dan Traficking terhadap Perempuan dan Anak melalui Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
7) Keterbatasan akses modal usaha bagi Kelompok UPPKS terutama anggota dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejatera I alasan ekonomi.
8) Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan.
9) Kurangnya pengetahuan tentang perlindungan perempuan dan anak pada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo, Renja PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 adalah tahapan kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo setiap tahun dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan, melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (*topdown – bottom up*).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, di samping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 perlu untuk mereview Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 untuk semakin menajamkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut tabel T-31 review terhadap RKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo 2026 sebagai berikut :

**TABEL TC-31**

**REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN PROBOLINGGO**

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo

| No | Rancangan Awal RKPD 2026 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 20.698.601.570,39 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 20.698.601.570,39 | | Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan akan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada |
| 2 | Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | | | | 20.698.601.570,39 | Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | | | | 20.698.601.570,39 | | |
| 2.08 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | | 860.000.000 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | | 860.000.000 | | |
| 2.08.02 | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase organisasi perempuan yang aktif | 50% | 485.000.000 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase organisasi perempuan yang aktif | 50% | 485.000.000 | | |
| 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender | 50% | 100.000.000 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender | 50% | 100.000.000 | DAU | |
| 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua | Persentase organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan | 100% | 325.000.000 | Pemberdayaan PerempuanBidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua | Persentase organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan | 100% | 325.000.000 | DAU, Hibah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kelurahan/Desa | pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota | | | Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kelurahan/Desa | pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota | | | | Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Probolinggo |
| 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan | 5 Lembaga | 60.000.000 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan | 5 Lembaga | 60.000.000 | | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani | 100% | 50.000.000 | Program Perlindungan Perempuan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani | 100% | 50.000.000 | | |
| 2.08.03.2.01 | Pencegahan KekerasanTerhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Jumlah lembaga yang terlibat dalam jejaring pencegahan kekerasan kepada perempuan | | | Pencegahan KekerasanTerhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Jumlah lembaga yang terlibat dalam jejaring pencegahan kekerasan kepada perempuan | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08.03.2.03 | Penguatan dan engembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan | 5 Dokumen | 50.000.000 | Penguatan dan engembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan | 5 Dokumen | 50.000.000 | | |
| 2.08.04 | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase Permasalahan keluarga yang terselesaikan | 100% | 70.000.000 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase Permasalahan keluarga yang terselesaikan | 100% | 70.000.000 | | |
| 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina | 100% | 70.000.000 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina | 100% | 70.000.000 | DAU | |
| 2.08.05 | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase kebutuhan data gender dan anak yang ter-update/terpenuhi | 50% | 5.000.000 | Program Pengelolaa Sistem Data Gender dan Anak | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase kebutuhan data gender dan anak yang ter-update/terpenuhi | 50% | 5.000.000 | | |
| 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase Perangkat Daerah yang telah menyediakan data gender dan atau anak | 50% | 5.000.000 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase Perangkat Daerah yang telah menyediakan data gender dan atau anak | 50% | 5.000.000 | DAU | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08.06 | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase desa/keluraha n yang telah ditetapkan sebagai desa/keluraha n layak anak | 28,48% | 125.000.000 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase desa/keluraha n yang telah ditetapkan sebagai desa/keluraha n layak anak | 28,48% | 125.000.000 | | |
| 2.08.06. 2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kotayang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenhan hak anak pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota | 10 Lembaga | 125.000.000 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kotayang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenhan hak anak pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota | 94 Desa/ Kelurah an | 125.000.000 | DAU | |
| 2.08.07 | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Des a | Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani | 100% | 125.000.000 | Program Perlindungan Khusus Anak | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Des a | Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani | 100% | 125.000.000 | | |
| 2.08.07. 2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Jumlah Peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak | | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Jumlah Peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 10% | 125.000.000 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 10% | 125.000.000 | Hibah | |
| | **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | **19.838.601.570,39** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | **19.838.601.570,39** | | |
| 2.14.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Nilai LHE AKIP PD | 82 Nilai | 7.408.996.570,39 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Nilai LHE AKIP PD | 82 Nilai | 7.408.996.570,39 | | |
| 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 10 Dokumen | 10.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 10 Dokumen | 10.000.000 | DAU | |
| 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | 12 Dokumen | 4.517.115.754,39 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | 12 Dokumen | 4.517.115.754,39 | DAU | |
| 2.14.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | 12 Dokumen | 200.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | 12 Dokumen | 200.000.000 | DAU | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.01.<br>2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Prosentase pemenuhan administrasi umum PD | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Prosentase pemenuhan administrasi umum PD | | | | |
| 2.14.01.<br>2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | | | | |
| 2.14.01.<br>2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | 12 Laporan | 1.464.210.816 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | 12 Laporan | 1.464.210.816 | DAU, DBH | |
| 2.14.01.<br>2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 1.508 Unit | 1.217.670.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 1.508 Unit | 1.217.670.000 | DAU, DAK Fisik | |
| 2.14.02 | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase penurunan ASFR | 65% | 494.400.000 | Program Pengendalian Penduduk | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase penurunan ASFR | 65% | 494.400.000 | | |
| 2.14.02.<br>2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase Program Berwawasan Kependudukan | 100% | 30.000.000 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase Program Berwawasan Kependudukan | 100% | 30.000.000 | DAU | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase penurunan angka kelahiran pada remaja 15-19 tahun (ASFR) | 65% | 464.400.000 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Persentase penurunan angka kelahiran pada remaja 15-19 tahun (ASFR) | 65% | 464.400.000 | DAK Non Fisik | |
| 2.14.03 | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Menurunnya TFR, Persentase Kampung KB dengan Strata Berkembang, Prevalensi peserta KB Aktif, Unmetneed | 1,7; 40; 5,3 TFR, Strata Kampung KB Berkembang, Unmeet Need | 5.934.805.000 | Pogram Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Menurunnya TFR, Persentase Kampung KB dengan Strata Berkembang, Prevalensi peserta KB Aktif, Unmerneed | 1,7; 40; 5,3 TFR, Strata Kampung KB Berkembang, Unmeet Need | 5.934.805.000 | | |
| 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase Pendewasaan Usia Pernikahan | 32% | 2.090.300.000 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase Pendewasaan Usia Pernikahan | 32% | 2.090.300.000 | DAK Non Fisik, DAU, Pajak Rokok | |
| 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan TenagaPenyuluh KB/PetugasLapanga n KB (PKB/PLKB) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Prosentase IMP Berkembang | 8,6% | 810.000.000 | Pendayagunaan TenagaPenyuluh KB/PetugasLapanga n KB (PKB/PLKB) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Prosentase IMP Berkembang | 8,6% | 810.000.000 | DAK Non Fisik, DAU | |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase pemenuhan alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan ke fasilitas Pelayanan Kesehatan | 85% | 2.308.505.000 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase pemenuhan alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan ke fasilitas Pelayanan Kesehatan | 85% | 2.308.505.000 | DAU | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase kampung KB yang mendapat pelayananan dan pembinaan kesertaan ber- KB | 85% | 726.000.000 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase kampung KB yang mendapat pelayananan dan pembinaan kesertaan ber- KB | 85% | 726.000.000 | DAU | |
| 2.14.04 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase Anggota Keluarga TRIBINA, UPPKS DAN PIK-R/M yang Aktif | 330 Poktan Tribina, UPPKA, PIK R | 6.000.400.000 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Persentase Anggota Keluarga TRIBINA, UPPKS DAN PIK-R/M yang aktif | 330 Poktan Tribina, UPPKA, PIK R | 6.000.400.000 | | |
| 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan keluarga keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 364 laporan | 139.600.000 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan keluarga keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 364 laporan | 139.600.000 | | |
| 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | 228.134 laporan | 5.860.800.000 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | 228.134 laporan | 5.860.800.000 | DAU | |

## 2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam rencana kerja perubahan tahunan ini adalah berasal dari seluruh bidang dan sekretariat yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempua, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo.

TABEL Tc-32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Penduduk,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | **DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo** | Persentase organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota | **225.000.000** | |
| | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | **DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo** | jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan | **2 Lembaga** | |

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | **DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo** | jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan (GOW dan DWP) | 2 Lembaga 150.000.000 dan 75.000.000 | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 75.000.000- | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo | jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek | 1 Lembaga (LPA KAB.PROBOLINGGO) | |
| | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo | jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK) | 1 Lembaga (LPA KAB.PROBOLINGGO 75.000.000 | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, susunan organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo terdiri dari :

1. Kepala Dinas 1 (satu) orang
2. Sekretaris Dinas 1 (satu) orang, yang membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:
   a. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda;
   b. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda;
   c. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda;
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
   a. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda;
   b. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda;
   c. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda;

5 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
   a. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda;
   b. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda;
   c. Penyuluh Sosial Muda;

6. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Probolinggo dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana keinginan masyarakat.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Program dan kegiatan SOPD mengacu kepada dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

Berdasarkan pernyataan tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1. Meningkatnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah, Indikator sasaran adalah persentase kenaikan (Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP perangkat daerah,
2. Meningkatnya penyelenggaran pengarusutamaan gender
3. Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Keluarga.

## 3.3. Program dan Kegiatan

Adapun rencana program dan kegiatan SOPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 sebagaimana berikut :

**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

**2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**

2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

**2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan,Kewenangan Kabupaten/Kota**

2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum Social dan Ekonomi

2.08.02.2.02.03 Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, atau ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota

**2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.**

2.08.02.2.03.01 Pendampngan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota.

**2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

**2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.**

2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

**2.08.03.2.01 Penguatan dan Pengembanga Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.**

2.08.03.2.01.01 Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

**2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

**2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudakan KG dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota**

2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.08.04.2.02.01 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

**2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SYSTEM DATA GENDER DAN ANAK**

**2.08.05.2.01 Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Pelembagan Data ditingakat Daerah Kabupaten/Kota**

2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan Kabupaten/Kota

**2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

**2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**

2.08.06.2.01.01 Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah nonpemerintah media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota

2.08.06.2.01.02 Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah nonpemerintah media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota

**2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

**2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

2.08.07.2.01.04 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA

**2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

2.08.07.2.03.06 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota

2.08.07.2.03.14 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota

**2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

2.14.01.2.01.01 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

2.14.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

**2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

2.14.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai

**2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

2.14.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2.14.01.2.06.03 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2.14.01.2.06.04 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan

2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

**2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

2.14.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

**2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik

2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perijinana Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan

2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

2.14.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

**2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

**2.14.02.2.01 Pemanduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**

2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal

**2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

**2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

**2.14.03.2.01 Pelaksanaan, Advokasi, Komunikasi, Informal Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**

2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK

2.14.03.2.01.10 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana

2.14.03.2.01.12 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

2.14.03.2.01.11 Pelaksanaan mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa, dan mini lokakarya

2.14.03.2.01.14 Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada sakeholders dan mitra kerja

**2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**

2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

2.14.03.2.02.05 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

**2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**

2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya

2.14.03.2.02.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

2.14.03.2.02.08 Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan termasuk jaringan dan jejaring

**2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**

2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB

2.14.03.2.04.06 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

2.14.03.2.04.07 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

**2.14.04. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**

**2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.**

2.14.04.2.01.16 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

2.14.03.2.04.06 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraab Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-T dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

2.14.03.2.04.07 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-T dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

**2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

2.14.04.2.02.01 Penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2.14.04.2.02.05 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk

remaja calon pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Balita)

2.14.04.2.02.06 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Balita).

Adapun anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

# TC-33

## Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah)

## Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Ppengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo 2026

**Nama SOPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

| Kode | | | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | | |
| | | | | | | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | 20.698.601.570,39 | | | | 18.800.000.000 |
| 2 | | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | 20.698.601.570,39 | | | | 18.800.000.000 |
| 2 | 08 | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | 860.000.000 | | | | 1.020.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | | | | | **PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Persentase organisasi perempuan yang aktif | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | 50% | 485.000.000 | DAU, Hibah | | 50% | 545.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | | | | Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 50% | 100.000.000 | DAU | | 50% | 70.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 07 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 1 Dokumen | 100.000.000 | DAU | | 1 Dokumen | 70.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | | | | Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemsyarakatan kewenangan kabupaten/kota | Persentase organisasi masyaraka yang mendapat advokasi dan pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | 100% | 325.000.000 | DAU, Hibah | | 100% | 375.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 06 | | | Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | 2 Lembaga | 225.000.000 | DAU | | 2 Lembaga | 225.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 08 | | | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | 2 Dokumen | 100.000.000 | DAU | | 2 Dokumen | 150.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 03 | | | Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah lembaga penyedia laynan pemberayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | 5 lembaga | 60.000.000 | DAU | | 5 lembaga | 100.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 07 | | | Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia laynan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia laynan pemberayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | 5 Lembaga | 60.000.000 | DAU | | 5 Lembaga | 100.000.000 |
| 2 | 08 | 03 | | | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 100% | 50.000.000 | DAU | | 100% | 25.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | | | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga yang terlibat dalam jejaring pencegahan kekerasan kepada perempuan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | | | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | | | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kerja sama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 5 Lembaga | 50.000.000 | DAU | | 11 Lembaga | 25.000.000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 09 | | | Penguatan kerjasama antar dan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kerja sama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 5 Dokumen | 50.000.000 | DAU | | 1 Dokumen | 25.000.000 |
| 2 | 08 | 04 | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | Persentase Permasalahan keluarga yang terselesaikan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 100% | 70.000.000 | DAU | | 100% | 100.000.000 |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 100% | 70.000.000 | DAU | | 100% | 100.000.000 |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | 01 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | 07 | | | Peningkatan kapasitas lembaga penyedia laynan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 0 Lembaga | 70.000.000 | DAU | | 0 Lembaga | 100.000.000 |
| 2 | 08 | 05 | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | Persentase kebutuhan data gender dan anak yang ter-update/terpenuhi | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 50% | 5.000.000 | DAU | | 50% | 10.000.000 |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | | | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang telah menyediakan data gender dan atau anak | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 50% | 5.000.000 | DAU | | 50% | 10.000.000 |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 01 | | | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | | | | | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 03 | | | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 0 dokumen | 5.000.000 | DAU | | 0 doikumen | 10.000.000 |
| 2 | 08 | 06 | | | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 28,48% | 125.000.000 | DAU | | 28,48% | 190.000.000 |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | | | | Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | Jumlah desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 94 Desa/ Kelurahan | 125.000.000 | DAU | | 94 Desa/ Kelurahan | 190.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 01 | | | Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah non pmerintah pada media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | | | | | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 03 | | | Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kab/kota yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 10 Lembaga | 125.000.000 | DAU | | 100 Organisasi | 190.000.000 |
| 2 | 08 | 07 | | | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Prosentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 100% | 125.000.000 | DAU, Hibah | | 100% | 150.000.000 |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | | | | Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota | Jumlah Peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | | | | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 04 | | | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | | | | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 10% | 125.000.000 | Hibah | | 10% | 150.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 13 | | | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 1 Orang | 75.000.000 | Hibah | | 1 Orang | 75.000.000 |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 14 | | | Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan bagi AMPK tingkat daerah kab/kota yang mendapatkan pendampingan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 1 Lembaga | 50.000.000 | Hibah | | 1 Orang | 75.000.000 |
| | | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | 19.838.601.570,39 | | | | 17.780.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai LHE AKIP PD | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | 82 Nilai | 7.408.996.570,39 | DAU, DBH | | 82 Nilai | 7.390.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | | | | Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 6 Dokumen | 10.000.000 | DAU | | 6 Dokumen | 15.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | 01 | | | Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 10 dokumen | 10.000.000 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 6 dokumen | 15.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | | | | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 12 Dokumen | 4.517.115.754,39 | DAU | | 12 Dokumen | 4.880.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 01 | | | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 35 Orang/bula n | 4.447.115.754,39 | DAU | | 35 Orang/bul an | 4.880.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 02 | | | Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 12 Dokumen | 70.000.000 | DAU | | 12 Dokumen | 80.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.05 | | | | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 12 Dokumen | 200.000.000 | DAU | | 12 Dokumen | 250.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 01 | 2.05 | 05 | | | Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 12 Dokumen | 200.000.000 | DAU | | 12 Dokumen | 250.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | | | | Administrasi umum perangkat daerah | Prosentase pemenuhan administrasi umum PD | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 01 | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 02 | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 4 Paket | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 03 | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 1 Paket | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 04 | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 05 | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 1 Paket | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 06 | | | Penyediaan bahan bacaan dan peratuaran perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | Kab. Probolinggo Dringu, kedungdalem | 1 Dokumen | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 09 | | | Penyelenggaraaan rapat keordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Probolinggo Dringu kedungdale m | 12 Laporan | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.07 | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.07 | 06 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 31 Unit | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | | | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 12 Laporan | 1.464.210.816 | DAU, DBH | | 12 Laporan | 1.560.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 02 | | | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 12 Laporan | 348.000.000 | DAU | | 12 Laporan | 360.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 04 | | | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab. Probolinggo Dringu kedungdale m | 12 Laporan | 1.116.210.816 | DBH | | 12 Laporan | 1.200.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 1.508 Unit | 1.217.670.000 | DAU | | 1.508 Unit | 1.225.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 01 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kab. Probolinggo Dringu kedungdale m | 4 Unit | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 02 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayar pajaknya | Kab. Probolinggo Dringu, kedungdalem | 36 Unit | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 06 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 0 Unit | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 09 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Probolinggo Dringu kedungdalem | 3 Unit | 1.217.670.000 | DAU | | 4 Unit | 1.225.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 10 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Probolinggo Dringu kedungdale m | 2 Unit | | | | | |
| 2 | 14 | 02 | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Persentase penurunan ASFR | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 65% | 494.400.000 | | | 65% | 560.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | | | | Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah dareah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | Persentase Program Berwawasan Kependudukan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 100% | 30.000.000 | DAU | | 100% | 40.000.000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 09 | | | Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal disatuan pendidikan SD/MI SLTP/MTS jalur formal dan informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 1 Satuan Pendidikan | 30.000.000 | DAU | | 1 Satuan Pendidikan | 40.000.000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | | | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penurunan angka kelahiran pada remaja 15-19 tahun (ASFR) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 65% | 464.400.000 | DAK Non Fisik | | 65% | 520.000.000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 09 | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Kab. Probolinggo, Dringu, Kedungdalem | 1 Laporan | 204.000.000 | DAK Non Fisik | | 1 Laporan | 220.000.000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 12 | | | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 24 Laporan | 260.400.000 | DAK Non Fisik | | 24 Laporan | 300.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | • Menurunnya TFR<br>• Persentase Kampung KB dengan strata Berkembang<br>• Prevalensi peserta KB Aktif<br>• Unmet Need | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 1,7 nilai<br>40%<br><br><br>85%<br><br>5,3% | 5.934.805.000 | | | 1,7 nilai<br>40%<br><br><br>85%<br><br>5,3% | 6.090.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | | | | Pelaksanaan advokasi,komunikasi , informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal | Persentase Pendewasaan Usia Pernikahan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 32% | 2.090.300.000 | DAK Non Fisik, DAU, Pajak Rokok | | 32% | 2.175.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 08 | | | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 10 | | | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 24 Laporan | 1.289.605.000 | DAK Non Fisik | | 24 Laporan | 1.350.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 11 | | | Pelaksanaan mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan, rapat koordinasi desa, dan mini lokakarya | Jumlah Laporan mekanisme operasional program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 24 Laporan | 480.000.000 | DAK Non Fisik | | 24 Laporan | 485.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 12 | | | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 1 Dokumen | 120.695.000 | DAU, Pajak Rokok | | 1 Dokumen | 130.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 14 | | | Advokasi program bangga kencana oleh pokja advokasi kepada stakeholders dan mitra kerja | Jumlah Organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 24 Organisasi | 200.000.000 | DAU, Pajak Rokok | | 24 Organisais | 210.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | | | | Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Prosentase IMP Berkembang | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 8,6% | 810.000.000 | DAK Non Fisik, DAU | | 8,6% | 830.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 | | | Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 660 Orang | 600.000.000 | DAK Non Fisik, DAU | | 660 Orang | 610.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 05 | | | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 5 Organisasi | 210.000.000 | DAK Non Fisik | | 5 Organisasi | 220.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | | | | Pengendalian dan Pendisitribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ kota | Persentase pemenuhan alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan ke fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 85% | 2.308.505.000 | DAU | | 85% | 2.325.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | | | Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya | Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 62 Laporan | 46.800.000 | DAU | | 62 Laporan | .48.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 03 | | | Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode MKJP | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 5226 Orang | 2.194.805.000 | DAU | | 5226 Laporan | 2.200.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | | | Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya | Jumlah Laporan hasil Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 62 Laporan | 36.900.000 | DAU | | 56 Laporan | 37.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 11 | | | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 56 Laporan | 2.390.905.000 | DAU | | 56 Laporan | 2.400.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | | | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Persentase kampung KB yang mendapat pelayananan dan pembinaan kesertaan ber- KB | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa | 85% | 726.000.000 | DAU | | 85% | 760.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 04 | | | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 06 | | | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung keluarga Berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 85 Kampung | 250.000.000 | DAU | | 85 Kampung | 270.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 07 | | | Itegrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 330 Dokumen | 476.000.000 | DAU | | 85 Kampung | 490.000.000 |
| 2 | 14 | 04 | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Persentase Anggota Keluarga TRIBINA, UPPKS DAN PIK-R/M yang aktif | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 330 Poktan Tribina, UPPKA, PIK R | 6.000.400.000 | DAU | | 330 Poktan Tribina, UPPKA, PIK R | 3.200.000.000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | | | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 330 Poktan | 5.860.800.000 | DAU | | 330 Poktan | 3.200.000.000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 01 | | | Penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 05 | | | Pemantauan data dan inforasi keluarga berisiko stuntig (Termasuk Remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, baduta/balita) | Cakupan pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, baduta/balita) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 10 Laporan | 2.664.000.000 | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | | 10 Laporan | 0 |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 06 | | | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, baduta/balita) | Jumlah keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapatkan pendampingan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 228.124 Laporan | 3.196.800.000 | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | | 228.124 Laporan | 3.200.000.000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | | | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | 139.600.000 | | | | 0 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 16 | | | Pengelolaan ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah Laporan hasil pengelolaan ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 24 Laporan | 9.600.000 | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | | 228.124 Laporan | 3.200.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 17 | | | Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan hasil pengelolaan ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 330 Laporan | 0 | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | | 330 Laporan | 0 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 18 | | | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPA) | Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketaaan dan kesejahteraan keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 10 Unit | 130.000.000 | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | | 10 Unit | 130.000.000 |

Pada Misi ke-5 Bupati Probolinggo yaitu Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal. SAE PEREMPUAN BERDAYA SAING 1.000 PENGUSAHA PEREMPUAN PAMERAN PRODUK UNGGULAN PEREMPUAN.Dalam mendukung visi dan misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 merupakan OPD pengampu pada Tujuan Pembangunan dengan Misi 5 (Lima) yaitu: **“SAE SOSIAL”** dengan uraian *“Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas”.* Tujuan Pembangunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo adalah *“Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal”* yang memuat 3 (Tiga) sasaran strategis.

Untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo berperan untuk pencapaian indikator dari Sasaran 1 *“Meningkatnya Kesetaraan Gender“* dan Sasaran 2 *“Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas”*.

# BAB IV

| Kode | | | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif APBD | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | | | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | 20.698.601.570,39 | |
| 2 | | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | 20.698.601.570,39 | |
| 2 | 08 | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN** | | 860.000.000 | |
| 2 | 08 | 02 | | | | | **PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | 50% | 485.000.000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | | | | Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota | 50% | 100.000.000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 07 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | | | | Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemsyarakatan kewenangan kabupaten/kota | 100% | 325.000.000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 06 | | | Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Lembaga | 225.000.000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 08 | | | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 2 Dokumen | 100.000.000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 03 | | | Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota | 5 lembaga | 60.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 07 | | | Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia laynan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Lembaga | 60.000.000 | |
| 2 | 08 | 03 | | | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | 100% | 50.000.000 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | | | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | 0 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 5 Lembaga | 50.000.000 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 09 | | | Penguatan kerjasama antar dan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 50.000.000 | |
| 2 | 08 | 04 | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | 100% | 70.000.000 | |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 70.000.000 | |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | 01 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | 07 | | | Peningkatan kapasitas lembaga penyedia laynan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Lembaga | 70.000.000 | |
| 2 | 08 | 05 | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | 50% | 5.000.000 | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | | | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 50% | 5.000.000 | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 01 | | | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 03 | | | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | 0 dokumen | 5.000.000 | |
| 2 | 08 | 06 | | | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | 28,48% | 125.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | | | | Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | 94 Desa/ Kelurahan | 125.000.000 | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 01 | | | Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah non pmerintah pada media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | | | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 03 | | | Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | 10 Lembaga | 125.000.000 | |
| 2 | 08 | 07 | | | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | 100% | 125.000.000 | |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | | | | Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota | | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 04 | | | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA | | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 10% | 125.000.000 | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 13 | | | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota | 1 Orang | 75.000.000 | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 14 | | | Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota | 1 Lembaga | 50.000.000 | |
| | | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | 19.838.601.570,39 | |
| 2 | 14 | 01 | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 82 Nilai | 7.408.996.570,39 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | | | | Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 6 Dokumen | 10.000.000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | 01 | | | Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 10 dokumen | 10.000.000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | | | | Administrasi keuangan perangkat daerah | 12 Dokumen | 4.517.115.754,39 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 01 | | | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 35 Orang/bula n | 4.447.115.754,39 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 02 | | | Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 70.000.000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.05 | | | | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | 12 Dokumen | 200.000.000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.05 | 05 | | | Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | 12 Dokumen | 200.000.000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | | | | Administrasi umum perangkat daerah | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 01 | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 02 | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 4 Paket | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 03 | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | 1 Paket | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 04 | | | Penyediaan bahan logistik kantor | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 05 | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 Paket | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 06 | | | Penyediaan bahan bacaan dan peratuaran perundang-undangan | 1 Dokumen | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 09 | | | Penyelenggaraaan rapat keordinasi dan konsultasi SKPD | 12 Laporan | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.07 | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.07 | 06 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 31 Unit | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | | | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 Laporan | 1.464.210.816 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 02 | | | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 Laporan | 348.000.000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 04 | | | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 12 Laporan | 1.116.210.816 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.508 Unit | 1.217.670.000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 01 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4 Unit | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 02 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 36 Unit | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 06 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 Unit | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 09 | | | Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3 Unit | 1.217.670.000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 10 | | | Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 Unit | | |
| 2 | 14 | 02 | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | 65% | 494.400.000 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | | | | Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah dareah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | 100% | 30.000.000 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 09 | | | Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal disatuan pendidikan SD/MI SLTP/MTS jalur formal dan informal | 1 Satuan Pendidikan | 30.000.000 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | | | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 65% | 464.400.000 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 09 | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 1 Laporan | 204.000.000 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 12 | | | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 24 Laporan | 260.400.000 | |
| 2 | 14 | 03 | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | 1,7 nilai<br>40%<br><br>85%<br><br>5,3% | 5.934.805.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | | | | Pelaksanaan advokasi,komunikasi , informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal | 32% | 2.090.300.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 08 | | | Pengendalian Program KKBPK | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 10 | | | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 24 Laporan | 1.289.605.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 11 | | | Pelaksanaan mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan, rapat koordinasi desa, dan mini lokakarya | 24 Laporan | 480.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 12 | | | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 Dokumen | 120.695.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 14 | | | Advokasi program bangga kencana oleh pokja advokasi kepada stakeholders dan mitra kerja | 24 Organisasi | 200.000.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | | | | Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 8,6% | 810.000.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 | | | Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 660 Orang | 600.000.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 05 | | | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 5 Organisasi | 210.000.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | | | | Pengendalian dan Pendisitribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ kota | 85% | 2.308.505.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | | | Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya | 62 Laporan | 46.800.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 03 | | | Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | 5226 Orang | 2.194.805.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | | | Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya | 62 Laporan | 36.900.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 11 | | | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 56 Laporan | 2.390.905.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | | | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 85% | 726.000.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 04 | | | Pembinaan Terpadu Kampung KB | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 06 | | | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung keluarga Berkualitas | 85 Kampung | 250.000.000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 07 | | | Itegrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 330 Dokumen | 476.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 04 | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | 330 Poktan Tribina, UPPKA, PIK R | 6.000.400.000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | | | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 330 Poktan | 5.860.800.000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 01 | | | Penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 05 | | | Pemantauan data dan inforasi keluarga berisiko stuntig (Termasuk Remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, baduta/balita) | 10 Laporan | 2.664.000.000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 06 | | | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, baduta/balita) | 228.124 Laporan | 3.196.800.000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | | | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 139.600.000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 16 | | | Pengelolaan ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 24 Laporan | 9.600.000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 17 | | | Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 330 Laporan | 0 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 18 | | | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPA) | 10 Unit | 130.000.000 | |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kondisi perkembangamn terkini. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut.

Renja ini merupakan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PROBOLINGGO**

PEMERINTAH KABUPATEN DP3A P2KB PROBOLINGGO

**HUDAN SYARIFUDDIN, S.Sos., M.Si.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19740831 199311 1 001



Dipindai dengan CamScanner

# RENCANA KERJA

# DINAS KETAHANAN PANGAN

# TAHUN ANGGARAN 2026

## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

# PENGANTAR

*Bismillahirohmanirrohim,*

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan untuk tahun anggaran 2026 disusun dengan mengacu kepada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo, RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 dan memperhatikan perkembangan urusan pangan yang terjadi selama tahun 2025. Di dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tercantum beberapa kegiatan sudah melalui proses dari rancangan awal hingga rancangan akhir Rencana Kerja serta memperhatikan masukan / usulan dari pihak masyarakat maupun dari pemangku kepentingan yang lain secara digital.

Harapan kami adalah sebagian besar Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun anggaran 2026 dapat ditindaklanjuti menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 di aplikasi SIPD.

Probolinggo, September 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Probolinggo

H. YAHYADI, SP. MMA.
Pembina Tk I.
NIP. 19660203 198903 1 013

DAFTAR ISI


| | | |
|---|---|---|
| I. | KATA PENGANTAR ..... | **I** |
| I. | PENDAHULUAN ..... | **1** |
| | [a] Latar Belakang ..... | **1** |
| | [b] Landasan Hukum ..... | **1** |
| | [c] Maksud dan Tujuan ..... | **3** |
| | [d] Sistematika Penulisan..... | **4** |
| II. | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024 ..... | **5** |
| | [a] Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo ..... | **5** |
| | [b] Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo ..... | **23** |
| | [c] Isu-isu penting penyelenggaraan tugas & fungsi SKPD ..... | **54** |
| | [d] Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ..... | **56** |
| III. | TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN ..... | **58** |
| | [a] Telaahan terhadap kebijakan Nasional & Provinsi | **58** |
| | [b] Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan ..... | **61** |
| | [c] Program dan Kegiatan ..... | **62** |
| IV. | PENUTUP ..... | **70** |

# BAB I PENDAHULUAN

## [1.1] Latar Belakang

Proses penyusunan Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan (Renja DKP) tahun 2026 dimulai sejak bulan Desember tahun 2024 dalam bentuk tabel dan melakukan penginputan program kegiatan melalui aplikasi SIPD Perencana sebagai dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

**Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan** ini dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (**RKPD**) Kabupaten Probolinggo dan menggunakan format yang telah ditetapkan sebagaimana yang diamanatkan dan diatur dalam Permendagri no 86 tahun 2017.

## [1.2] Lantaran Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
d. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunanngunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
j. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
k. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045.
l. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.
m. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah;
n. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo.

[1.3] Maksud dan Tujuan

a. **Maksud** penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Probolinggo adalah menuangkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024, isue-isue strategis yang berkembang dan usulan program serta kegiatan yang

berasal dari masyarakat sehingga dapat dibuat langkah-langkah yang diperlukan untuk tahun berikutnya.

b. **Tujuan** penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Probolinggo adalah menentukan Kebijakan, Program, kegiatan, Lokasi, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif sebagai bahan RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026.

[1.4] Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN
BAB IV. PENUTUP

# BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024

## [2.1] Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan

Kinerja Dinas Ketahanan dapat dipahami dari aspek penyediaan pangan, pemanfaatan pangan, dan Aksesbilitas pangan. Beberapa indikator bisa menjelaskan 3 aspek tersebut, seperti Pola Pangan Harapan, Stabilitas harga komoditi pangan, Ketersediaan pangan, serta penyaluran pangan, Keamanan pangan, dan penanganan daerah rawan pangan. Kinerja-kinerja diatas telah menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan baik secara keseluruhan (tim) maupun perseorangan.

Sebagaimana yang ditentukan dalam RPD tahun 2024-2026 Kabupaten Probolinggo (jangka menengah) dimana peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi merupakan Indikator Kinerja Utama sasaran yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. PPH konsumsi dianggap memadai dalam mewakili semua cakupan kinerja urusan pangan yang ada.

Untuk pengukuran capaian setiap tahun PPH konsumsi ini dijabarkan kepada pencapaian rata-rata konsumsi kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan agar lebih mudah dalam merencanakan, mengevaluasi dan menyusun kebijakan urusan pangan. Berapa kelompok pangan sudah mencapai kondisi yang baik sedangkan beberapa kelompok pangan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja tahun 2024, Tingkat pencapaian indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja | | Satuan | Target Th 2024 | Realisasi Th 2024 | Capaian Kinerja (%) | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tujuan | | | | | | | |
| Meningkatan Ketahanan Pangan | A | Pola Pangan Harapan Konsumsi | Skor | 81 | 85,7 | 105,8 | Sangat Baik |
| Sasaran Strategis | | | | | | | |
| Meningkatkan konsumsi Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumber Daya Pangan | 1 | Rata-rata konsumsi padi-padian | gram/ kapita /hari | 310,6 | 314,1 | 101,12 | Sangat Baik |
| | 2 | Rata-rata konsumsi umbi-umbian | gram/ kapita /hari | 55,5 | 36,1 | 65,04 | Cukup |
| | 3 | Rata-rata konsumsi pangan hewani | gram/ kapita /hari | 102,2 | 98,3 | 96,18 | Baik |
| | 4 | Rata-rata konsumsi minyak dan lemak | gram/ kapita /hari | 27,6 | 28,2 | 102,17 | Sangat Baik |
| | 5 | Rata-rata konsumsi buah/biji berminyak | gram/ kapita /hari | 2,6 | 1,1 | 42,30 | Kurang |
| | 6 | Rata-rata konsumsi kacang-kacangan | gram/ kapita /hari | 35,9 | 31,5 | 87,74 | Baik |
| | 7 | Rata-rata konsumsi gula | gram/ kapita /hari | 26,4 | 24,2 | 91,66 | Baik |
| | 8 | Rata-rata konsumsi sayur dan buah | gram/ kapita /hari | 192,9 | 203,4 | 105,44 | Sangat Baik |
| | 9 | Rata-rata konsumsi Lain-lain) | gram/ kapita /hari | 111,3 | 86,2 | 77,44 | Baik |
| Meningkatnya kualitas | | Kenaikan Nilai LHE SAKIP | Nilai | 82 | 77,40 | 94,39 | Baik |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tata kelola Pemerintah Daerah | | Dinas Ketahanan Pangan | | | | | |

Sumber : DKP Kabupaten Probolinggo (2024)

Dilihat dari tabel tersebut capaian yang diperoleh pada indikator skor pola harapan konsumsi memperoleh nilai yang sangat memuaskan, akan tetapi pada indikator Peningkatan konsumsi Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumber Daya Pangan ada dua indikator yang memperoleh nilai cukup dan kurang memuaskan. Hal tersebut dikarekan adanya beberapa kendala, diantaranya yaitu kurangnya mencapai target/skor yang telah ditetapkan dan kurangnya keberagaman konsumsi masyarakat untuk buah/biji berminyak.

Dari tabel tersebut diatas, indikator skor pola harapan konsumsi memperoleh nilai yang sangat memuaskan, akan tetapi pada indikator Peningkatan konsumsi Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumber Daya Pangan ada dua indikator yang memperoleh nilai cukup dan kurang memuaskan. Hal tersebut dikarekan adanya beberapa kendala, diantaranya yaitu kurangnya mencapai target/skor yang telah ditetapkan dan kurangnya keberagaman konsumsi masyarakat untuk buah/biji berminyak.

Tabel 2.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ke-1 dengan target akhir RPD yang terdapat dalam RENSTRA.

| Tujuan dan Sasaran | | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | Target Akhir RENSTRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | Capaian 2024 thd target 2026 |
| Tujuan | | | | | | | | |
| Meningkatan Ketahanan Pangan | A | Pola Pangan Harapan Konsumsi | Skor | 85,7 | | | 87,5 | 104,64 % |
| Sasaran Strategis | | | | | | | | |
| | 1 | Rata-rata konsumsi padi-padian | gram/ kapita /hari | 314,1 | | | 309,2 | 101,58 % |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan konsumsi Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumber Daya Pangan | 2 | Rata-rata konsumsi umbi-umbian | gram/ kapita /hari | 36,1 | | | 58,9 | 61,29 % |
| | 3 | Rata-rata konsumsi pangan hewani | gram/ kapita /hari | 98,3 | | | 104,2 | 94,34 % |
| | 4 | Rata-rata konsumsi minyak dan lemak | gram/ kapita /hari | 28,2 | | | 27,6 | 102,17 % |
| | 5 | Rata-rata konsumsi buah /biji berminyak | gram/ kapita /hari | 1,1 | | | 3,1 | 35,48 % |
| | 6 | Rata-rata konsumsi kacang-kacangan | gram/ kapita /hari | 31,5 | | | 36,2 | 87,02 % |
| | 7 | Rata-rata konsumsi gula | gram/ kapita /hari | 24,2 | | | 26,5 | 91,32 % |
| | 8 | Rata-rata konsumsi sayur dan buah | gram/ kapita /hari | 203,4 | | | 197,5 | 102,99 % |
| | 9 | Rata-rata konsumsi Lain-lain) | gram/ kapita /hari | 86,2 | | | 111,3 | 77,45 % |
| Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah Daerah | | Kenaikan Nilai LHE SAKIP Dinas Ketahanan Pangan | Nilai | 77,40 | | | - | 94,39 |

Sumber : DKP Kabupaten Probolinggo (2024)

Dari tabel tersebut diatas, capaian 2024 terhadap target 2026 yang diperoleh oleh Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan nilai yang cukup baik, walaupun ada di beberapa indikator mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Hal tersebut dikarekan adanya beberapa kendala, diantaranya yaitu kurangnya mencapai target/skor yang telah ditetapkan dan kurangnya keberagaman konsumsi masyarakat untuk buah/biji berminyak.

Tabel 2.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan capaian nasional, provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Probolinggo

| INDIKATOR | | SATUAN | REALISASI TAHUN 2024 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi skor PPH | Kkal/ kapita/hari | 95,2 | Nasional |
| | | Kkal/ kapita/hari | Data belum terbit | Provinsi Jawa Timur |
| | | Kkal/ kapita/hari | 85,7 | Kabupaten Probolinggo |
| 2 | Realisasi skor PPH ketersediaan | Kkal/ kapita/hari | Data belum terbit | Nasional |
| | | Kkal/ kapita/hari | Data belum terbit | Provinsi Jawa Timur |
| | | Kkal/ kapita/hari | 82,15 | Kabupaten Probolinggo |
| 3 | Realisasi konsumsi energi | Kkal/ kapita/hari | 2051,54 | Nasional |
| | | Kkal/ kapita/hari | 2046,20 | Provinsi Jawa Timur |
| | | Kkal/ kapita/hari | 2.046,5 | Kabupaten Probolinggo |
| 4 | Realisasi konsumsi protein | gram/ kapita/hari | 61,70 | Nasional |
| | | gram/ kapita/hari | 60,48 | Provinsi Jawa Timur |
| | | gram/ kapita/hari | 59,4 | Kabupaten Probolinggo |

Sumber : Bapanas, BPS, DPKP Jawa Timur, DKP Kab. Probolinggo diolah (2020-2024)

Konsumsi Energi dan Protein Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Jika melihat tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kecukupan energi belum memenuhi anjuran Peraturan Kementerian Kesehatan no 28 tahun 2019

(2100 kkal/hari) namun dengan kekurangan nilai yang tidak terlalu jauh. Berbeda dengan kolom protein yang menunjukkan tingkat kecukupan protein di Kabupaten Probolinggo yang mendapatkan nilai skor diatas anjuran Permenkes yaitu 57 gram/hari.

Tabel 2.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan s.d tahun 2024 Kabupaten Probolinggo

| Kode | Urusan / bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis DKP tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja DKP Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis DKP s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja DKP Tahun 2024 | Realisasi Renja DKP Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 02.09. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 02.09.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | |
| 02.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan | 1% | 1 | 1 | 1 | 100% | 1,00% | | 0% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | 5% | 1 | 5 | 1 | 20% | 5,20% | | 0% |
| 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah unit Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 1 Unit | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% |
| 2.09.02.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 02.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Komoditas yang Rata-rata Harganya Stabil -Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan - Persentase Masyarakat yang Mendapat Pembinaan Penganekaragaman Pangan | % | | | | | | | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Skor PPH Ketersediaan | 82 | 82 | 82 | 85,7 | 105% | 82,4 | 85,5 | 104% |
| 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | 1 | 120 | 120 | 100% | 1 | 0 | 0% |
| 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase Cadangan Pangan | % | 0 | 15 | 216,6 | 1444% | 22 | 10 | 45% |
| 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 60 | | 142 | 216,6 | 153% | 200 | 20 | 10% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.03.2.02.0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara | 60 | | 60 | 60 | 100% | 90 | 20 | 22% |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Persentase AKE dan AKP Perkapita sesuai dengan AKG yang tercapai | 98,5 dan 104,7 | | 100 | | 0% | 98,5 dan 104,7 | 98,5 dan 104,7 | 100% |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 02.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Wilayah dalam Daerah yang tidak Rawan Pangan | 88 | | 88 | | 0% | 91 | 95 | 104% |
| 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Per Kecamatan yang disusun | 1 | 1 | 5 | 8 | 160% | 1 | 1 | 100% |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.04.2.01.0001 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Desa Rawan Pangan yang Tertangani | 40 | | 1 | | 0% | 30 | 2 | 7% |
| 2.09.04.2.02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 9 | | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 2.09.04.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2.09.04.2.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 02.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan | Jumlah PSAT yang diregistrasi | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 02.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Persentase Pelayanan kesekretariatan yang dilaksanakan | | | | | | 1 | | 0% |
| 02.09.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Evaluasi Kinerja tersusun | | | | | | | | |
| 02.09.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2,00 | 3 | 150% |
| 02.09.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2,00 | 2 | 100% |
| 02.09.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 | 1 | 1 | 3 | 300% | 1 | 1 | 100% |
| 02.09.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | 4 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 02.09.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 | 33 | 30 | 33 | 110% | 33 | 33 | 100% |
| 02.09.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 15 | | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% |
| 02.09.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 24 | | 24 | 24 | 100% | 24 | 24 | 100% |
| 02.09.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 02.09.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 02.09.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase barang milik daerah DKP terkelola | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100 | 10000 % |
| 02.09.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 02.09.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian DKP Terlaksana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 02.09.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 02.09.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 | | 6 | 6 | 100% | 10 | 3 | 30% |
| 02.09.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 33 | | 33 | 33 | 100% | 33 | 33 | 100% |
| 02.09.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan | 33 | | 33 | 33 | 100% | 33 | 33 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| 01.09.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana | 100 | | | | | 100 | 100 | 100% |
| 01.09.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 | 1 | 6 | 6 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 01.09.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 01.09.01.1.06.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 01.09.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 01.09.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 01.09.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | |
| 01.09.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan Barang Milik Daerah | 100 | | | | | 100 | 75 | 75% |
| 01.09.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 | | 10 | 10 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 01.09.01.1.07.000 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
| 01.09.01.1.0 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | | | | | 100 | 100 | 100% |
| 01.09.01.1.0.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 7 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 01.09.01.1.0.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | 100 | | | | | 100 | 100 | 100% |
| 01.09.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 35 | 15 | 15 | 15 | 100% | 35 | 35 | 100% |
| 01.09.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 22 | 40 | 40 | 40 | 100% | 22 | 22 | 100% |
| 01.09.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

## [2.2] Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo

| No | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi | 100 | --- | 79,30 | 79,50 | 80,70 | 81,90 | 81,00 | 85,70 | 86,63 | 87,52 | meningkat kinerjanya |
| 2 | Skor Pola Pangan Harapan konsumsi padi-padian | 25 | --- | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | meningkat kinerjanya |
| 3 | Skor Pola Pangan Harapan konsumsi umbi-umbian | 3 | --- | 1,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 0,91 | 1,01 | 1,11 | meningkat kinerjanya |
| 4 | Skor Pola Pangan Harapan konsumsi pangan hewani | 24 | --- | 16,90 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,00 | 18,34 | 18,69 | 19,05 | meningkat kinerjanya |
| 5 | Skor Pola Pangan Harapan konsumsi minyak dan lemak | 5 | --- | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | meningkat kinerjanya |
| 6 | Skor Pola Pangan Harapan konsumsi buah/biji berminyak | 1 | --- | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | meningkat kinerjanya |
| 7 | Skor Pola Pangan Harapan konsumsi kacang-kacangan | 10 | --- | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 7,70 | 7,91 | 8,04 | 8,17 | meningkat kinerjanya |
| 8 | Skor Pola Pangan Harapan konsumsi gula | 3 | --- | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,12 | 2,14 | 2,16 | meningkat kinerjanya |
| 9 | Skor Pola Pangan Harapan konsumsi sayur dan buah | 30 | --- | 22,70 | 20,60 | 21,60 | 22,60 | 22,20 | 26,31 | 26,54 | 26,77 | meningkat kinerjanya |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Skor Pola Pangan Harapan konsumsi lain-lain | - | --- | - | - | - | - | - | - | - | - | meningkat kinerjanya |
| 11 | konsumsi padi-padian (gram/kapita/hari) | 289 | --- | 314,9 | 310,6 | 309,2 | 309,2 | 319,7 | 314,1 | 311,3 | 308,5 | meningkat kinerjanya |
| 12 | rerata konsumsi Umbi-umbian (gram/kapita/hari) | 105 | --- | 45,1 | 55,5 | 58,9 | 58,9 | 43,1 | 36,1 | 41,3 | 46,5 | meningkat kinerjanya |
| 13 | rerata konsumsi Pangan hewani (gram/kapita/hari) | 157 | --- | 96,7 | 102,2 | 104,2 | 104,2 | 89,9 | 98,3 | 100,2 | 102,1 | meningkat kinerjanya |
| 14 | rerata konsumsi Minyak dan lemak (gram/kapita/hari) | 21 | --- | 27,5 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 26,8 | 28,2 | 27,9 | 27,6 | meningkat kinerjanya |
| 15 | Rerata konsumsi Buah/ Biji berminyak (gram/kapita/hari) | 11 | --- | 1,2 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 1,5 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | meningkat kinerjanya |
| 16 | Rerata konsumsi Kacang-kacangan (gram/kapita/hari) | 37 | --- | 35,1 | 35,9 | 36,2 | 36,2 | 27,5 | 31,5 | 32,0 | 32,6 | meningkat kinerjanya |
| 17 | Rerata konsumsi Gula (gram/kapita/hari) | 31 | --- | 26,0 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | 25,5 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | meningkat kinerjanya |
| 18 | Rerata konsumsi Sayur dan buah (gram/kapita/hari) | 262 | --- | 179,1 | 192,9 | 197,5 | 197,5 | 188,2 | 203,4 | 205,2 | 206,9 | meningkat kinerjanya |
| 19 | Rerata konsumsi Lain-lain (gram/kapita/hari) | | --- | 80,0 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 77,4 | 86,2 | 87,518 | 88,819 | meningkat kinerjanya |
| 20 | Angka Kecukupan Energi (Kkal/kapita/hari) | 2.100 | --- | 2.190 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.027,5 | 2.046,5 | 2.100 | 2.100 | meningkat kinerjanya |
| 21 | Angka kecukupan protein (gram/kapita/hari) | 57 | --- | 62,6 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,4 | 59,4 | 57,0 | 57,0 | meningkat kinerjanya |
| 22 | Cadangan pangan pemerintah kabupaten (ton setara beras) | - | --- | 500,0 | 60,0 | 90,0 | 120,0 | 50,0 | 68,6 | 18,0 | 25,0 | meningkat kinerjanya |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jumlah desa Rentan Pangan Tinggi (Prioritas 1) | - | --- | - | - | - | - | - | - | - | - | meningkat kinerjanya |
| 24 | Jumlah desa Rentan Pangan Sedang (Prioritas 2) | - | --- | 1 | 2 | 17 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | meningkat kinerjanya |
| 25 | Jumlah desa Rentan Pangan Rendah (Prioritas 3) | - | --- | 5 | 1 | 40 | 35 | 5 | 1 | 2 | 2 | meningkat kinerjanya |
| 26 | Jumlah desa Tahan Pangan Rendah (Prioritas 4) | - | --- | 9 | 7 | 110 | 122 | 9 | 7 | 7 | 8 | meningkat kinerjanya |
| 27 | Jumlah desa Tahan Pangan Sedang (Prioritas 5) | - | --- | 24 | 24 | 130 | 130 | 24 | 24 | 24 | 24 | meningkat kinerjanya |
| 28 | Jumlah desa Tahan Pangan Tinggi (Prioritas 6) | - | --- | 291 | 296 | 33 | 33 | 291 | 296 | 296 | 296 | meningkat kinerjanya |

[2.3] Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

a. Inflasi yang dipengaruhi oleh harga pangan

Inflasi komponen Bergejolak (volatile food) dipengaruhi oleh komoditas bahan pangan strategis, Inflasi lebih dipengaruhi oleh faktor bahan makanan (volatile food) yang umumnya diakibatkan karena adanya gangguan pada proses produksi pangan strategis.Harga pangan terutama beras mengalami kenaikaan

b. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo masih relative tinggi, Angka **kemiskinan** di Kabupaten Probolinggo yang masih tinggi (***16,45**% tahun 2024*) Di Kabupaten Probolinggo. Daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi adalah daerah dengan permasalahan pangan yang tinggi juga. Persentase pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan minuman penduduk miskin adalah **56,19 persen** dari total pengeluaran.

c. **Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi (PoU/Prevalence of Undernourisment)**.PoU menggambarkan bahwa terdapat permasalahan konsumsi pangan masyarakat, semakin tinggi angka PoU maka semakin tinggi jumlah masyarakat yang

tercakup dalam kekurangan konsumsi. Pada tahun 2024 angka PoU adalah 11,83 (angka BPS) artinya dari sejumlah 1.185.200 jiwa penduduk Kabupaten Probolinggo terdapat 140.209 jiwa yang tercakup PoU

d. **Krisis Pangan** menjadi perhatian yang besar, Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam, dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.Terkait tata kelola pangan yang **tidak bisa mengikuti perubahan** yang semakin cepat, dimana sumber daya dan daya tampung lingkungan semakin berkurang. Isu terkait **bencana alam dan pangan** mencakup banyak aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan. **Kecenderungan kejadian Bencana semakin besar. Bencana alam adalah ancaman besar terhadap ketahanan pangan.** Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memiliki:

- Sistem peringatan dini
- Infrastruktur yang tangguh
- Cadangan pangan strategis
- Dukungan bagi petani untuk pulih setelah bencana

[2.4] Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tabel 2.6. Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo

| No | Rancangan Awal Renja | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp 000 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan dana Rp 000 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | 12.441.000 | | | | | 17.242.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | | | | 6.379.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | | | | 5.970.000 | |
| 0 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 20.500 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 11.500 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 10.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 6.000 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil | 2 dokumen | 1.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil | 2 dokumen | 1.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 500 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | - | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Laporan | 500 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Laporan | 500 | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Laporan | 500 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Laporan | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | Kantor DKP | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 1.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | Kantor DKP | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 1.000 | |
| 7 | Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Kantor DKP | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 2.000 | Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Kantor DKP | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 1.000 | |
| 8 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Kantor DKP | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 laporan | 5.000 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Kantor DKP | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 laporan | 2.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 4.745.500 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 4.711.500 | |
| 9 | Penyediaan Gaji dan Tunangan ASN | Kantor DKP | Jumlah Orang yang Menerima | **33** orang /bulan | 4.700.000 | Penyediaan Gaji dan Tunangan ASN | Kantor DKP | Jumlah Orang yang Menerima Gaji | **33** orang /bulan | 4.700.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | dan Tunjangan ASN | | | |
| 11 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 dokumen | 10.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 dokumen | 8.000 | |
| 12 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 dokumen | 10.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 dokumen | 500 | |
| 13 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kantor DKP | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kantor DKP | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 500 | |
| 14 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1 dokumen | 2.000 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1 dokumen | 1.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | | dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | |
| 15 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kantor DKP | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD | **12** laporan | 2.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kantor DKP | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD | **12** laporan | 1.000 | |
| 16 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | **1** dokumen | 500 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | **1** dokumen | 500 | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 4.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 1.500 | |
| 17 | Penyusunan Perencanaan | Kantor DKP | Jumlah Rencana Kebutuhan | **1** dokumen | 500 | Penyusunan Perencanaan | Kantor DKP | Jumlah Rencana Kebutuhan | **1** dokumen | 500 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | Barang Milik Daerah SKPD | | | Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| 18 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kantor DKP | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | **1** Laporan | 1.000 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kantor DKP | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | **1** Laporan | - | |
| 19 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kantor DKP | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | **1** Laporan | 500 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kantor DKP | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | **1** Laporan | 500 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 99.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 21.000 | |
| 20 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kantor DKP | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | **1** unit | 10.000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kantor DKP | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | **1** unit | 3.000 | |
| 21 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kantor DKP | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | **1** paket | 20.000 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kantor DKP | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | **1** paket | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | **1** dokumen | 3.000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | **1** dokumen | - | |
| 23 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | **1** dokumen | 5.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | **1** dokumen | - | |
| 24 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja Pegawai | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | **1** dokumen | 3.000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja Pegawai | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | **1** dokumen | 1.000 | |
| 25 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Kantor DKP | Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan | **3** orang | 6.000 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Kantor DKP | Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan | **3** orang | - | |
| 26 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kantor DKP | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | **4** orang | 40.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kantor DKP | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | **4** orang | 10.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kantor DKP | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | **33** orang | 2.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kantor DKP | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | **33** orang | 2.000 | |
| 28 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kantor DKP | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | **33** orang | 10.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kantor DKP | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | **33** orang | 5.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 345.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 179.500 | |
| 29 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kantor DKP | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | **1** paket | 10.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kantor DKP | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | **1** paket | 1.000 | |
| 30 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kantor DKP | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | **2** paket | 100.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kantor DKP | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | **2** paket | 10.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kantor DKP | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | **1** paket | 5.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kantor DKP | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | **1** paket | 500 | |
| 32 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kantor DKP | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | **3** paket | 90.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kantor DKP | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | **3** paket | 90.000 | |
| 33 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kantor DKP | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | **1** paket | 10.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kantor DKP | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | **1** paket | 2.000 | |
| 34 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | **1** dokumen | 5.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | **1** dokumen | - | |
| 35 | Penyediaan Bahan/Material | Kantor DKP | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | **1** paket | 10.000 | Penyediaan Bahan/Material | Kantor DKP | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | **1** paket | 1.000 | |
| 36 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kantor DKP | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | **1** Laporan | 5.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kantor DKP | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | **1** Laporan | 5.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kantor DKP | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 90.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kantor DKP | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 60.000 | |
| 38 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 dokumen | 10.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 dokumen | 5.000 | |
| 39 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 10.000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kantor DKP | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 5.000 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 180.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 180.000 | |
| 40 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kantor DKP | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 unit | 100.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kantor DKP | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 unit | 100.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Kantor DKP | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 unit | 80.000 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Kantor DKP | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 unit | 80.000 | Pengadaan website |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 665.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 545.000 | |
| 42 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kantor DKP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 100.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kantor DKP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 90.000 | |
| 43 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kantor DKP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 laporan | 5.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kantor DKP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 laporan | 5.000 | |
| 44 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kantor DKP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 560.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kantor DKP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 450.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 320.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 320.000 | |
| 45 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kantor DKP | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | **35** unit | 200.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kantor DKP | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | **35** unit | 200.000 | |
| 46 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kantor DKP | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | **22** unit | 50.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kantor DKP | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | **22** unit | 50.000 | |
| 47 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Kantor DKP | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | **1** unit | 20.000 | Pemeliharaan Aset Tak Berwuud | Kantor DKP | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | **1** unit | 20.000 | Pengembangan aplikasi SIPG |
| 48 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kantor DKP | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | **1** unit | 50.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kantor DKP | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | **1** unit | 50.000 | |
| | [PROGRAM] PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK | | | | 1.850.000 | [PROGRAM] PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK | | | | 1.850.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | | | | | KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | | | | | |
| | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.850.000 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.850.000 | |
| 49 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | kabupaten Probolinggo | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | **2** unit | 500.000 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | kabupaten Probolinggo | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | **2** unit | 500.000 | |
| 50 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | **1** Laporan | 350.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | **1** Laporan | 350.000 | Pembinaan lumbung pangan tingkat desa |
| 51 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia | **1** unit | 1.000.000 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | kabupaten Probolinggo | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia | **1** unit | 1.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [PROGRAM] PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | 3.460.000 | [PROGRAM] PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | 8.670.000 | |
| | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | 650.000 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | 650.000 | |
| 52 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kabupaten Probolinggo | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | **1** Laporan | 50.000 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kabupaten Probolinggo | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | **1** Laporan | 50.000 | |
| 53 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | **1** Laporan | 20.000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | **1** Laporan | 20.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | **0** unit | 20.000 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | **0** unit | 20.000 | |
| 55 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | **200** keluarga | 200.000 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | **200** keluarga | 200.000 | |
| 56 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten /Kota | **1** Laporan | 100.000 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten /Kota | **1** Laporan | 100.000 | |
| 57 | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kabupaten Probolinggo | Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal | **1** Laporan | 20.000 | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kabupaten Probolinggo | Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal | **1** Laporan | 20.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | 0 unit | 30.000 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | 0 unit | 30.000 | |
| 59 | Pemantauan Stok Pangan | Kabupaten Probolinggo | Informasi Stok Pangan | 1 Laporan | 40.000 | Pemantauan Stok Pangan | Kabupaten Probolinggo | Informasi Stok Pangan | 1 Laporan | 40.000 | |
| 60 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten /Kota | 1 Laporan | 50.000 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten /Kota | 1 Laporan | 50.000 | |
| 61 | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten /Kota | 1 dokumen | 10.000 | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten /Kota | 1 dokumen | 10.000 | |
| 62 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | Kabupaten Probolinggo | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | 1 Laporan | 40.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | Kabupaten Probolinggo | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | 1 Laporan | 40.000 | |
| 63 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | Kabupaten Probolinggo | Informasi Harga dan Pasokan Pangan | 1 dokumen | 50.000 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | Kabupaten Probolinggo | Informasi Harga dan | 1 dokumen | 50.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Pasokan Pangan | | | |
| 64 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM | Kabupaten Probolinggo | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 dokumen | 20.000 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM | Kabupaten Probolinggo | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 dokumen | 20.000 | |
| | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | 1.930.000 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | 7.140.000 | |
| 65 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Kabupaten Probolinggo | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 1 dokumen | 10.000 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Kabupaten Probolinggo | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 1 dokumen | 10.000 | |
| 66 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota | 200 ton | 10.000 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota | 200 ton | 10.000 | |
| 67 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota yang Terpelihara | 200 ton | 1.800.000 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota yang Terpelihara | 500 ton | 7.000.000 | sesuai dengan SK Perbapanas |
| 68 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan | 200 ton | 70.000 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan | 300 ton | 70.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemerintah Kab/Kota | | | | | Pemerintah Kab/Kota | | | |
| 69 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara | **200** ton | 40.000 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara | **300** ton | 50.000 | |
| | Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | | | | 10.000 | Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | | | | 10.000 | |
| 70 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | **1** Laporan | 10.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | **1** Laporan | 10.000 | |
| | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | 870.000 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan | | | | 870.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Angka Kecukupan Gizi | | | | | |
| 71 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Kabupaten Probolinggo | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 dokumen | 20.000 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Kabupaten Probolinggo | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 dokumen | 20.000 | |
| 72 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 laporan | 800.000 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 laporan | 800.000 | |
| 73 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 1 laporan | 50.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 1 laporan | 50.000 | |
| | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | 632.000 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | 632.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | 50.000 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | 50.000 | |
| 74 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Kabupaten Probolinggo | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 1 dokumen | 50.000 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Kabupaten Probolinggo | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 1 dokumen | 50.000 | |
| | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 582.000 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 582.000 | |
| 75 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota | 1 dokumen | 200.000 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota | 1 dokumen | 200.000 | Sasaran angka PoU, rawan sedang dan berat |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | 1 Laporan | 2.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten /kota | 1 Laporan | 2.000 | |
| 77 | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 1 dokumen | 350.000 | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 1 dokumen | 350.000 | Sasaran angka resiko stunting |
| 78 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten /Kota | 1 dokumen | 30.000 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten /Kota | 1 dokumen | 30.000 | |
| | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | 120.000 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | 120.000 | |
| | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | 70.000 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | 70.000 | |
| 79 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | 1 dokumen | 10.000 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | 1 dokumen | 10.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Daerah Kabupaten /Kota | | | | | Daerah Kabupaten /Kota | | | |
| 80 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 1 dokumen | 10.000 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 1 dokumen | 10.000 | |
| 81 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 dokumen | 20.000 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten /kota | 1 dokumen | 20.000 | |
| 82 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Kabupaten Probolinggo | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Laporan | 20.000 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Kabupaten Probolinggo | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Laporan | 20.000 | |
| 83 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Kabupaten Probolinggo | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas | 1 dokumen | 10.000 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan | Kabupaten Probolinggo | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas | 1 dokumen | 10.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | segar asal tumbuhan | | keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | |
| | Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro | | | | 50.000 | Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro | | | | 50.000 | |
| 84 | Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi Pelaku usaha kecil dan mikro yang Dilaksanakan | 1 dokumen | 50.000 | Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro | Kabupaten Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi Pelaku usaha kecil dan mikro yang Dilaksanakan | 1 dokumen | 50.000 | Pemintaan kecamatan Lumbang dan Leces |

[2.5] Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.7. Usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026 Kabupaten Probolinggo

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | |
| | **[PROGRAM] PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | | | | |
| | **[KEGIATAN] Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | *Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya* | Kabupaten Probolinggo | | | |
| | *Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik* | Kabupaten Probolinggo | | | |
| | **[PROGRAM] PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | |
| | **[KEGIATAN] Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | | | | |
| | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kabupaten Probolinggo | | | |
| | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kabupaten Probolinggo | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **[KEGIATAN] Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | | | | |
| | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Kabupaten Probolinggo | | | |
| | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Desa Sidodadi Paiton | Bantuan pangan | | Kecamatan Lumbang |
| | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Desa Sidodadi Paiton | | | |
| | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Kabupaten Probolinggo | | | |
| | **[PROGRAM] PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | |
| | **[KEGIATAN] Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | |
| | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | | | |
| | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Kabupaten Probolinggo | | | |
| | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | | | |
| | **[PROGRAM] PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | |
| | **[KEGIATAN] Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | | | |
| | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | Kabupaten Probolinggo | | | |
| | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Kabupaten Probolinggo | | | |
| | **[KEGIATAN] Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro** | Kabupaten Probolinggo | | | |
| | Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro | Kabupaten Probolinggo | Pembinaan PDUK PSAT | 1 | Kecamatan Lumbang |

# BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN

## [3.1] Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada pembangunan nasional tahun 2025-2029 Pemerintah nasional menyusun sasaran dalam bentuk Asta Cita, sebagaimana berikut ini :

ASTA CITA 1 :

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

ASTA CITA 2 :

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

ASTA CITA 3 :

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

ASTA CITA 4 :

Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

ASTA CITA 5 :

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

ASTA CITA 6 :

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

ASTA CITA 7 :

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

ASTA CITA 8 :

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Kontribusi urusan pangan terhadap Asta Cita antara lain

| ASTA CITA 2 | ASTA CITA 5 | ASTA CITA 7 |
|---|---|---|
| PP Swasembada pangan<br>PP Ekosistem Ekonomi Sirkular | PP Peningkatan perdagangan domestic antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global | PP Pengendalian inflasi |

Arah Kebijakan dan Strategi **Badan Pangan Nasional**, dituangkan melalui empat (4) critical success factor sebagai variable kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi Badan Pangan Nasional.

1. Kebijakan **menjamin ketersediaan pangan**

   **Sasaran Strategis 1.** *Terwujudnya ketersediaan dan stabilitas harga pangan*, dengan strategi :

   i. Meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri
   ii. Pengendalian impor dan ekspor pangan
   iii. Penguatan cadangan pangan nasional
   iv. Pemerataan disteribusi dan penguatan logistic pangan
   v. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen
   vi. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan

2. Kebijakan **menjamin keterjangkauan pangan**

   **Sasaran Strategis 2.** Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, dengan strategi :

   i. Perluasan akses informasi kerawanan pangan
   ii. Mitigasi potensi krisis pangan

iii. Penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan
iv. Penyaluran bantuan pangan terfortifikasi
v. Pengoptimalan upaya penyelamatan pangan

3. Kebijakan **menjamin Pemanfaatan Pangan**

**Sasaran Strategis 3.** Meningkatnya kualitas konsumsi pangan, dengan strategi :

i. Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya local
ii. Sosialisasi promosi, edukasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA)
iii. Penguatan usaha menengah kecil mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal
iv. Penguatan data situasi konsumsi pangan

**Sasaran Strategis 4.** Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi :

i. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan pangan segar
ii. Penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar
iii. Penguatan system jaminan keamanan dan mutu pangan
iv. Pengawasan keamanan pangan di pre market dan post market

4. Kebijakan **menjamin terselenggaranya reformasi birokrasi**

**Sasaran Strategis 5.** Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, dengan strategi :

i. Penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan
ii. Penguatan system pengawasan
iii. Penguatan tata kelola perencanaan yang berkualitas
iv. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel
v. Pengelolaan asset dan barang milik Negara yang tertib dan akuntabel
vi. Penataan organisasi dan penguatan kelembagaan
vii. Penataan managemen sumber daya manusia aparatur
viii. Peningkatan indeks reformasi hokum.

[3.2] Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan

**Tema Pembangunan Daerah Tahun 2026**

***MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI INOVASI DAN SINERGITAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN***

***Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026***

1) Peningkatan Tata Kelola Dan Layanan Publik Yang Bersih Dan Akuntabel;
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Miskin;
4) Peningkatan Ketahanan Daerah;
5) Peningkatan Nilai Tambah Sektor Basis;
6) **Peningkatan Ketahanan Pangan;**
7) Peningkatan Realisasi Investasi;
8) Penyediaan Layanan Infrastruktur Yang Merata, Berkualitas Dan Berkelanjutan

Pada prioritas pembangunan Daerah no 6 **Peningkatan Ketahanan Pangan**, Dinas Ketahanan Pangan,

[3.3] Program dan Kegiatan

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dan Prakiraan maju tahun 2027 Kabupaten Probolinggo

| Kode | Urusan /bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **02.09.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | 5.782.576 | | | | 5.869.900 |
| **02.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | *Persentase Peningkatan nilai LHE AKIP Dinas Ketahanan Pangan* | | 0,2% | 5.161.374 | SILPA | | 0,2% | 5.218.800 |
| **02.09.01. 1.01** | **[KEGIATAN] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | *Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun* | | 100 | 9.000 | SILPA | | 100 | 11.000 |
| 02.09.01. 2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Kabupaten Probolinggo | 2 dok | 5.000 | SILPA | | 2 dok | 8.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01. 2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Kabupaten Probolinggo | 2 dok | 1.000 | SILPA | | 2 dok | 500 |
| 02.09.01. 2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - | SILPA | | 1 dok | 500 |
| 02.09.01. 2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | Kabupaten Probolinggo | 2 Laporan | - | DAU | | 2 Laporan | - |
| 02.09.01. 2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | Kabupaten Probolinggo | 2 Laporan | - | DAU | | 2 Laporan | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Kabupaten Probolinggo | 3 Laporan | 1.000 | SILPA | | 3 Laporan | 500 |
| 02.09.01.2.01.0007 | Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Kabupaten Probolinggo | 4 Laporan | 1.000 | SILPA | | 4 Laporan | 500 |
| 02.09.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | *Jumlah Laporan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah* | Kabupaten Probolinggo | 1 laporan | 1.000 | SILPA | | 1 laporan | 1.000 |
| **02.09.01.1.02** | **[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | *Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun* | | 100 | 4.570.657 | SILPA, DAU | | 100 | 4.108.187 |
| 02.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Kabupaten Probolinggo | **33** orang /bulan | 4.561.656 | DAU | | **33** orang /bulan | 4.099.187 |
| 02.09.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | Kabupaten Probolinggo | 0 dok | - | SILPA | | 0 dok | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01. 2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - | SILPA | | 1 dok | |
| 02.09.01. 2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 9.000 | SILPA | | 1 dok | 9.000 |
| 02.09.01. 2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - | SILPA | | **1** Laporan | |
| 02.09.01. 2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - | SILPA | | 1 dok | |
| 02.09.01. 2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan* | Kabupaten Probolinggo | **12** laporan | - | SILPA | | **12** laporan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | | | | |
| 02.09.01. 2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - | SILPA | | 1 dok | |
| **02.09.01. 1.03** | **[KEGIATAN] Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | *Persentase barang milik daerah DKP terkelola* | | 100% | - | SILPA | | 100% | 2.000 |
| 02.09.01. 2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - | SILPA | | 1 dok | |
| 02.09.01. 2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | Kabupaten Probolinggo | 0 dok | - | SILPA | | 0 dok | |
| 02.09.01. 2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | Kabupaten Probolinggo | **0** Laporan | - | SILPA | | **0** Laporan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01. 2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - | SILPA | | **1** Laporan | |
| 02.09.01. 2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | Kabupaten Probolinggo | **0** laporan | - | SILPA | | **0** laporan | |
| 02.09.01. 2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - | SILPA | | **1** Laporan | 2.000 |
| 02.09.01. 2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | Kabupaten Probolinggo | 0 dok | - | SILPA | | 0 dok | |
| **02.09.01. 2.05** | **[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | *Persentase Administrasi Kepegawaian DKP Terlaksana* | | 100% | 42.420 | SILPA | 100% | | 42.425 |
| 02.09.01. 2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | Kabupaten Probolinggo | **1** unit | - | SILPA | | **1** unit | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01. 2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | Kabupaten Probolinggo | **1** paket | - | SILPA | | **1** paket | |
| 02.09.01. 2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - | SILPA | | 1 dok | 2.425 |
| 02.09.01. 2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - | SILPA | | 1 dok | |
| 02.09.01. 2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja Pegawai | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - | SILPA | | 1 dok | |
| 02.09.01. 2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | *Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan* | Kabupaten Probolinggo | **3** orang | - | SILPA | | **3** orang | |
| 02.09.01. 2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | *Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas* | Kabupaten Probolinggo | | - | SILPA | | | |
| 02.09.01. 2.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN | *Jumlah ASN yang dipindahtugaskan* | Kabupaten Probolinggo | | - | SILPA | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01. 2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Kabupaten Probolinggo | **4** orang | - | SILPA | | **4** orang | 10.000 |
| 02.09.01. 2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | Kabupaten Probolinggo | **33** orang | 42.420 | SILPA | | **33** orang | 10.000 |
| 02.09.01. 2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Kabupaten Probolinggo | **33** orang | - | SILPA | | **33** orang | 20.000 |
| **02.09.01. 2.06** | **[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah** | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana* | | | 102.950 | SILPA | | | 120.000 |
| 02.09.01. 2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Kantor DKP | **1** paket | - | SILPA | | **1** paket | - |
| 02.09.01. 2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan* | Kantor DKP | **2** paket | - | SILPA | | **2** paket | 10.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Kantor yang Disediakan* | | | | | | | |
| 02.09.01. 2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Kantor DKP | **1** paket | - | SILPA | | **1** paket | - |
| 02.09.01. 2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Kantor DKP | **3** paket | 51.000 | SILPA | | **3** paket | 60.000 |
| 02.09.01. 2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Kantor DKP | **1** paket | 5.000 | SILPA | | **1** paket | 5.000 |
| 02.09.01. 2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | Kantor DKP | 1 dok | - | SILPA | | 1 dok | - |
| 02.09.01. 2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | Kantor DKP | **1** paket | - | SILPA | | **1** paket | - |
| 02.09.01. 2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Kantor DKP | **1** Laporan | - | SILPA | | **1** Laporan | 5.000 |
| 02.09.01. 2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Wilayah Indonesia | **1** Laporan | 41.950 | SILPA | | **1** Laporan | 30.000 |
| 02.09.01. 2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan* | Kantor DKP | 1 dok | 2.000 | SILPA | | 1 dok | 6.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | | | | |
| 02.09.01. 2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | Kantor DKP | 1 dok | 3.000 | SILPA | | 1 dok | 4.000 |
| **02.09.01. 2.07** | **[KEGIATAN] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunang Urusan Pemerintah Daerah** | *Persentase pengadaan Barang Milik Daerah* | | | - | SILPA | | | 25.500 |
| 02.09.01. 2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | - |
| 02.09.01. 2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | - |
| 02.09.01. 2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | *Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | - |
| 02.09.01. 2.07.0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | *Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.<br>2.07.0005 | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | |
| 02.09.01.<br>2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Kabupaten Probolinggo | **7** unit | - | SILPA | | **7** unit | 25.500 |
| 02.09.01.<br>2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | |
| 02.09.01.<br>2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | Kabupaten Probolinggo | **1** unit | - | SILPA | | **1** unit | |
| 02.09.01.<br>2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | |
| 02.09.01.<br>2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | |
| 02.09.01.<br>2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.09.02.2.08** | **[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | 65.097 | SILPA | | | 599.688 |
| 02.09.02.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | Kabupaten Probolinggo | **0** laporan | - | SILPA | | **0** laporan | - |
| 02.09.02.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | 65.097 | SILPA | | **1** Laporan | 67.000 |
| 02.09.02.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Kabupaten probolinggo | **1** laporan | - | SILPA | | **1** laporan | - |
| 02.09.02.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Kabupaten probolinggo | **1** Laporan | - | SILPA | | **1** Laporan | 532.688 |
| **02.09.01.1.09** | **[KEGIATAN] ' Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara* | | | 231.372 | SILPA | | | 310.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas abatan | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Kantor DKP | **35** unit | 221.372 | SILPA | | **35** unit | 250.000 |
| 02.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Kantor DKP | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* | Kantor DKP | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | *Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya* | Kantor DKP | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | Kantor DKP | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Kantor DKP | **22** unit | 10.000 | SILPA | | **22** unit | 20.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | Kantor DKP | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | Kantor DKP | **1** unit | - | SILPA | | **1** unit | 20.000 |
| 02.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Kantor DKP | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Kantor DKP | **1** unit | - | SILPA | | **1** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Kantor DKP | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | 20.000 |
| 02.09.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | *Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi* | Kantor DKP | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.09.02** | **[PROGRAM] PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | *Persentase Peningkatan ketersediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan* | | 1% | 106.000 | SILPA | | 1% | 107.200 |
| **2.09.02.2 .01** | **[KEGIATAN] Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | *Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan* | | 1% | 106.000 | SILPA | | 1% | 107.200 |
| 2.09.02.2. 01.0003 | *Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya* | *Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - | SILPA | | **2** unit | - |
| 2.09.02.2. 01.0004 | *Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik* | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | 106.000 | SILPA | Berperan dalam mendukung SAE Mandiri (10 desa Mandiri) | **1** Laporan | 107.200 |
| 2.09.02.2. 01.0006 | *Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | *Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - | SILPA | | **1** unit | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.09.03** | **[PROGRAM] PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Skor PPH Ketersediaan | | 81,56 | 377.780 | SILPA | | 81,56 | 382.000 |
| **2.09.03.2 .01** | **[KEGIATAN] Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | *Skor PPH Ketersediaan kelompok pangan* | | | 47.000 | SILPA | | | 48.000 |
| | | • *Padi-padian* | | 25 | | | | *25,00* | |
| | | • *Umbi-umbian* | | 2,45 | | | | *2,45* | |
| | | • *Pangan Hewani* | | 15,44 | | | | *15,84* | |
| | | • *Minyak dan Lemak* | | 5 | | | | *5,00* | |
| | | • *Buah/Biji Berminyak* | | 0,05 | | | | *0,02* | |
| | | • *Kacang-kacangan* | | 0,86 | | | | *0,96* | |
| | | • *Gula* | | 2,29 | | | | *2,29* | |
| | | • *Sayur dan buah* | | 30 | | | | *30,00* | |
| | | • *Lain-lain* | | 0 | | | | *0,00* | |
| 2.09.03.2. 01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | *Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - | SILPA | | **1** Laporan | |
| 2.09.03.2. 01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | *Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - | SILPA | | **1** Laporan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.03.2.01.0006 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | *Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | |
| 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga* | Kabupaten Probolinggo | **200** keluarga | - | SILPA | | **200** keluarga | |
| 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | *umlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - | SILPA | Berperan penurunan angka PoU secara tidak langsung | **1** Laporan | |
| 2.09.03.2.01.0009 | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | *Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - | SILPA | | **1** Laporan | |
| 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | *Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - | SILPA | | **0** unit | |
| 2.09.03.2.01.0011 | Pemantauan Stok Pangan | *Informasi Stok Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - | SILPA | Berperan penurunan angka PoU secara | **1** Laporan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tidak langsung | | |
| 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | *Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | 30.000 | SILPA | Berperan penurunan angka PoU dengan menunjang kegiatan lain | **1** Laporan | 30.000 |
| 2.09.03.2.01.0013 | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | *Informasi Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 10.000 | SILPA | Berperan penurunan angka PoU dengan menunjang kegiatan lain | 1 dok | 10.000 |
| 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - | SILPA | | **1** Laporan | |
| 2.09.03.2.01.0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | *Informasi Harga dan Pasokan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - | SILPA | | 1 dok | |
| 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM | *Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 7.000 | SILPA | Berperan penurunan angka PoU dengan menunjang kegiatan lain | 1 dok | 8.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.09.03.2.02** | **[KEGIATAN] Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | *Persentase Cadangan Pangan dari yang ditetapkan* | | | 253.121 | SILPA | | | 256.000 |
| 2.09.03.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten / Kota | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - | SILPA | | 1 dok | |
| 2.09.03.2.02.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | *Rencana Kebutuhan Pangan Lokal* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - | SILPA | | 1 dok | |
| 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | Desa Sidodadi Paiton | **200** ton | 233.121 | SILPA | Berperan penurunan angka PoU secara langsung | **200** ton | 236.000 |
| 2.09.03.2.02.0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara* | Desa Sidodadi Paiton | **300** ton | - | SILPA | | **300** ton | - |
| 2.09.03.2.02.0005 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | *Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota* | Kabupaten Probolinggo | **300** ton | 10.000 | SILPA | Berperan penurunan angka PoU secara langsung | **300** ton | 10.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.03.2.02.0006 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara* | Desa Sidodadi Paiton | **300** ton | 10.000 | SILPA | Berperan penurunan angka PoU secara langsung | **300** ton | 10.000 |
| **2.09.03.2.04** | **[KEGIATAN] Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | *Persentase AKE konsumsi Perkapita sesuai dengan AKG yang tercapai* | | 95% | 77.659 | SILPA | | 95% | 78.000 |
| | | *Persentase AKP konsumsi Perkapita sesuai dengan AKG yang tercapai* | | 95% | | | | 95% | |
| 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | *Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 3.000 | SILPA | Berperan penurunan angka PoU dengan menunjang kegiatan lain | 1 dok | 3.000 |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | Kabupaten Probolinggo | **1** laporan | 74.659 | SILPA | Berperan penurunan angka PoU secara langsung | **1** laporan | 75.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun* | Kabupaten Probolinggo | **1** laporan | - | SILPA | | **1** laporan | - |
| 2.09.03.3.04.0005 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | *Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | Kabupaten Probolinggo | | | SILPA | | | 0 |
| **2.09.03.3.03.** | **Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi** | *Jumlah komoditas pangan lokal yang ditentukan harga minimum daerah* | | | 0 | SILPA | | | 0 |
| 2.09.03.3.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal* | Kabupaten Probolinggo | | | SILPA | | | |
| 2.09.03.3.03.0002 | Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota | *Jumlah Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota mengenai penentuan harga Pangan Lokal* | Kabupaten Probolinggo | | | SILPA | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Minimum daerah Yang Disusun* | | | | | | | |
| **02.09.04** | **[PROGRAM] PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | *indeks Ketahanan Pangan meningkat* | | 75 | 150.000 | SILPA | | 75 | 151.700 |
| **2.09.04.2 .01** | **[KEGIATAN] Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | *Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Per Kecamatan yang disusun* | | 1Dok | 20.000 | SILPA | | 1 Dok | 20.000 |
| 2.09.04.2. 01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 20.000 | SILPA | Berperan penurunan angka PoU dengan menunjang kegiatan lain | 1 dok | 20.000 |
| **2.09.04.2 .02** | **[KEGIATAN] Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | *Jumlah Desa sangat tahan Pangan* | | 302 Desa | 130.000 | SILPA | | 302 Desa | 131.700 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - | SILPA | Berperan penurunan angka PoU secara langsung | 1 dok | 111.700 |
| 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | 12.000 | SILPA | Berperan penurunan angka PoU dengan menunjang kegiatan lain | **1** Laporan | - |
| 2.09.04.2.02.0004 | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | *Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 98.000 | SILPA | mendukung penurunan angka PoU dan Mendukung SAE buaian bunda | 1 dok | - |
| 2.09.04.2.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | *Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 20.000 | SILPA | Berperan penurunan angka PoU dengan menunjang kegiatan lain | 1 dok | 20.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.09.05** | **[PROGRAM] PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | *Jumlah Sampel PSAT* | | 50 Sampel | 10.000 | SILPA | | 50 Sampel | 10.200 |
| **2.09.05.2 .01** | **[KEGIATAN] Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | *Jumlah Sampel PSAT yang diregistrasi* | | 50 Sampel | 10.000 | SILPA | | 50 Sampel | 10.200 |
| 2.09.05.2. 01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | | SILPA | | 1 dok | - |
| 2.09.05.2. 01.0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | *Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 10.000 | SILPA | Berperan dalam mendukung SAE Pendapatan Keluarga | 1 dok | 10.200 |
| 2.09.05.2. 01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | | SILPA | | 1 dok | - |
| 2.09.05.2. 01.0008 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | *Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | | SILPA | | **1** Laporan | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *mutu pangan segar asal tumbuhan* | | | | | | | |
| 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | *Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | | SILPA | | 1 dok | - |
| **2.09.05.3.02.** | **[KEGIATAN] Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro** | *Jumlah Pelaku Usaha kecil dan mikro yang Terbina* | Kabupaten Probolinggo | | - | SILPA | | | - |
| 2.09.05.3.02.001 | Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi Pelaku usaha kecil dan mikro yang Dilaksanakan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - | SILPA | Berperan dalam mendukung SAE Pendapatan Keluarga | 1 dok | - |

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 Kabupaten Probolinggo

| Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan*) | Kelompok Sasaran | Rencana Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Lokasi | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **02.09.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | 5.782.576 |
| **02.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | *Persentase Peningkatan nilai LHE AKIP Dinas Ketahanan Pangan* | | | 0,2 % | 5.021.496 |
| **02.09.01.1.01** | **[KEGIATAN] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | *Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun* | | | 100 % | 9.000 |
| 02.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 2 dok | 5.000 |
| 02.09.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 2 dok | 1.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - |
| 02.09.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 2 Laporan | - |
| 02.09.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 2 Laporan | - |
| 02.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 3 Laporan | 1.000 |
| 02.09.01.2.01.0007 | Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 4 Laporan | 1.000 |
| 02.09.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | *Jumlah Laporan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 1 laporan | 1.000 |
| **02.09.01.1.02** | **[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | *Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun* | | | 100% | 4.570.657 |
| 02.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **33** orang /bulan | 4,561,657 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 0 dok | - |
| 02.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - |
| 02.09.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 9.000 |
| 02.09.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - |
| 02.09.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - |
| 02.09.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **12** laporan | - |
| 02.09.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - |
| **02.09.01.1.03** | **[KEGIATAN] Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | *Persentase barang milik daerah DKP terkelola* | | | 100% | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - |
| 02.09.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 0 dok | - |
| 02.09.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** Laporan | - |
| 02.09.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - |
| 02.09.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** laporan | - |
| 02.09.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - |
| 02.09.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 0 dok | - |
| **02.09.01.2.05** | **[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | *Persentase Administrasi Kepegawaian DKP Terlaksana* | | | 100% | 42.420 |
| 02.09.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **1** unit | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **1** paket | - |
| 02.09.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - |
| 02.09.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - |
| 02.09.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja Pegawai | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - |
| 02.09.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | *Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **3** orang | - |
| 02.09.01.2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | *Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | | - |
| 02.09.01.2.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN | *Jumlah ASN yang dipindahtugaskan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | | - |
| 02.09.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **4** orang | - |
| 02.09.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **33** orang | 42.420 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **33** orang | - |
| **02.09.01.2.06** | **[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah** | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana* | | | 100% | 102.950 |
| 02.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **1** paket | - |
| 02.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **2** paket | - |
| 02.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **1** paket | - |
| 02.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **3** paket | 51.000 |
| 02.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **1** paket | 5.000 |
| 02.09.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | 1 dok | - |
| 02.09.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **1** paket | - |
| 02.09.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **1** Laporan | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Wilayah Indonesia | **1** Laporan | 41.950 |
| 02.09.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | 1 dok | 2.000 |
| 02.09.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | 1 dok | 3.000 |
| **02.09.01.2.07** | **[KEGIATAN] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunang Urusan Pemerintah Daerah** | *Persentase pengadaan Barang Milik Daerah* | | | 100% | - |
| 02.09.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | *Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.07.0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | *Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **7** unit | - |
| 02.09.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **1** unit | - |
| 02.09.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - |
| **02.09.02.2.08** | **[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | 100% | 65.097 |
| 02.09.02.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** laporan | - |
| 02.09.02.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | 65.097 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.02.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten probolinggo | **1** laporan | - |
| 02.09.02.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kabupaten probolinggo | **1** Laporan | - |
| **02.09.01.1.09** | **[KEGIATAN] ' Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara* | | | 100% | 231.372 |
| 02.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas abatan | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **35** unit | 221.372 |
| 02.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan | *Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **0** unit | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | |
| 02.09.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **22** unit | 10.000 |
| 02.09.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **1** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **0** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **1** unit | - |
| 02.09.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **0** unit | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | *Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi* | *ASN Dinas Ketahanan Pangan* | Kantor DKP | **0** unit | - |
| **02.09.02** | **[PROGRAM] PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | *Persentase Peningkatan ketersediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan* | | | 1% | 106.000 |
| **2.09.02.2.01** | **[KEGIATAN] Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | *Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan* | | | 1% | 106.000 |
| 2.09.02.2.01.0003 | *Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya* | *Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia* | *Pengelola lumbung pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - |
| 2.09.02.2.01.0004 | *Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik* | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik* | *Pengelola lumbung pangan* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | 106.000 |
| 2.09.02.2.01.0006 | *Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | *Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia* | *Pengelola lumbung pangan* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - |
| **02.09.03** | **[PROGRAM] PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | *Skor PPH Ketersediaan* | | | 81,56 | 377.780 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.09.03.2.01** | **[KEGIATAN] Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | *Skor PPH Ketersediaan kelompok pangan*<br>***Padi-padian*** | | | 25 | 47.000 |
| | | ***Umbi-umbian*** | | | 2,45 | |
| | | ***Pangan Hewani*** | | | 15,84 | |
| | | ***Minyak dan Lemak*** | | | 5 | |
| | | ***Buah/Biji Berminyak*** | | | 0,02 | |
| | | ***Kacang-kacangan*** | | | 0,96 | |
| | | ***Gula*** | | | 2,29 | |
| | | ***Sayur dan buah*** | | | 30 | |
| | | ***Lain-lain*** | | | 0 | |
| 2.09.03.2.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | *Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia* | *Masyarakat umum* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - |
| 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | *Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan* | *Masyarakat umum* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - |
| 2.09.03.2.01.0006 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | *Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan* | *Masyarakat umum* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - |
| 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga* | *Masyarakat umum* | Kabupaten Probolinggo | **200** keluarga | - |
| 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | *umlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota* | *Masyarakat umum* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.03.2.01.0009 | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | *Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal* | *Masyarakat umum* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - |
| 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | *Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan* | *Masyarakat umum* | Kabupaten Probolinggo | **0** unit | - |
| 2.09.03.2.01.0011 | Pemantauan Stok Pangan | *Informasi Stok Pangan* | *Masyarakat umum* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - |
| 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | *Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota* | *Masyarakat umum* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | 30.000 |
| 2.09.03.2.01.0013 | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | *Informasi Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota* | *Masyarakat umum* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 10.000 |
| 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis* | *Masyarakat umum* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | - |
| 2.09.03.2.01.0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | *Informasi Harga dan Pasokan Pangan* | *Masyarakat umum* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - |
| 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM | *Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)* | *Masyarakat umum* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 7.000 |
| **2.09.03.2.02** | **[KEGIATAN] Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | *Persentase Cadangan Pangan dari yang ditetapkan* | | | 100% | 253.121 |
| 2.09.03.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian* | *Masyarakat terdampak* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten / Kota | *Cadangan Pangan Kabupaten/Kota* | *bencana dan masyarakat kekurangan pangan / miskin* | | | |
| 2.09.03.2.02.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | *Rencana Kebutuhan Pangan Lokal* | *Masyarakat terdampak bencana dan masyarakat kekurangan pangan / miskin* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - |
| 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | *Masyarakat terdampak bencana dan masyarakat kekurangan pangan / miskin* | Desa Sidodadi Paiton | **200** ton | 233.121 |
| 2.09.03.2.02.0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara* | *Masyarakat terdampak bencana dan masyarakat kekurangan pangan / miskin* | Desa Sidodadi Paiton | **300** ton | - |
| 2.09.03.2.02.0005 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | *Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota* | *Masyarakat terdampak bencana dan masyarakat kekurangan pangan / miskin* | Kabupaten Probolinggo | **300** ton | 10.000 |
| 2.09.03.2.02.0006 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara* | *Masyarakat terdampak bencana dan* | Desa Sidodadi Paiton | **300** ton | 10.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *masyarakat kekurangan pangan / miskin* | | | |
| 2.09.03.3.02. | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | Desa Sidodadi Paiton | | |
| 2.09.03.3.02.0005 | Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota Yang Disusun* | *Lumbung Pangan Kabupaten dan desa* | Kabupaten Probolinggo | | |
| **2.09.03.2.04** | **[KEGIATAN] Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | *Persentase AKE konsumsi Perkapita sesuai dengan AKG yang tercapai* | | | 95 % | 77.659 |
| | | *Persentase AKP konsumsi Perkapita sesuai dengan AKG yang tercapai* | | | 95 % | |
| 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | *Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun* | *Seluruh masyarakat* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 3.000 |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | *PKK dan seluruh masyarakat* | Kabupaten Probolinggo | **1** laporan | 74.659 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun* | *Seluruh masyarakat* | Kabupaten Probolinggo | **1** laporan | - |
| 2.09.03.3.04.0005 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | *Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | *Seluruh masyarakat* | Kabupaten Probolinggo | | |
| **2.09.03.3.03.** | **Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi** | *Jumlah komoditas pangan lokal yang ditentukan harga minimum daerah* | | | | 0 |
| 2.09.03.3.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal* | *Produsen pangan dan pelaku usaha pangan* | Kabupaten Probolinggo | | |
| 2.09.03.3.03.0002 | Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota | *Jumlah Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah Yang Disusun* | *Produsen peraturan dengan pelaku usaha peraturan* | Kabupaten Probolinggo | | |
| **02.09.04** | **[PROGRAM] PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | *indeks Ketahanan Pangan meningkat* | | | 75 | 150.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.09.04.2.01** | **[KEGIATAN] Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | *Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Per Kecamatan yang disusun* | | | 1 Dok | 20.000 |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan* | *Seluruh masyarakat* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 20.000 |
| **2.09.04.2.02** | **[KEGIATAN] Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | *Jumlah Desa sangat tahan Pangan* | | | 302 Desa | 130.000 |
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | *Masyarakat di kawasan rentan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - |
| 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota* | *Masyarakat di kawasan rentan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | 12.000 |
| 2.09.04.2.02.0004 | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | *Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi* | *Masyarakat di kawasan rentan Pangan/ potensi stunting* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 98.000 |
| 2.09.04.2.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | *Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota* | *Masyarakat di kawasan rentan Pangan* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 20.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.09.05** | **[PROGRAM] PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | *Jumlah Sampel PSAT* | | | 50 Sampel | 10.000 |
| **2.09.05.2.01** | **[KEGIATAN] Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | *Jumlah PSAT yang diregistrasi* | | | 50 Sampel | 10.000 |
| 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* | *Pelaku Usaha PDUK* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | |
| 2.09.05.2.01.0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | *Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan* | *Pelaku Usaha PDUK* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | 10.000 |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota* | *Pelaku Usaha PDUK* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | |
| 2.09.05.2.01.0008 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | *Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | *Pelaku Usaha PDUK* | Kabupaten Probolinggo | **1** Laporan | |
| 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | *Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | *Pelaku Usaha PDUK* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | |
| **2.09.05.3.02.** | **[KEGIATAN] Pembinaan keamanan pangan bagi** | *Jumlah Pelaku Usaha kecil dan mikro yang Terbina* | | Kabupaten Probolinggo | | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **pelaku usaha kecil dan mikro** | | | | | |
| 2.09.05.3. 02.001 | Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi Pelaku usaha kecil dan mikro yang Dilaksanakan* | *Pelaku Usaha PDUK* | Kabupaten Probolinggo | 1 dok | - |

## BAB V. PENUTUP

- Rencana Kerja tahun anggaran 2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo ini disusun. Proses perencanaan yang telah dikerjakan menghasilkan beberapa bahan bagi penyusunan KUA PPAS. Beberapa hal yang penting adalah Permendagri 900.1.5.5-1317 tahun 2023 yang merubah beberapa sub kegiatan dalam urusan pangan.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan :
  - Dokumen Renja ini perlu disosialisasi secara intern ke personel Dinas Ketahanan Pangan;
  - Perlu disusun Kerangka Acuan Kerja untuk masing-masing Sub Kegiatan;
  - Dalam penjabaran Renja ke RKA perlu selalu berorientasi kepada hasil (outcome). Subtansi dari perencanaan ini bisa memberikan outcome yang bermanfaat bagi pembangunan urusan Pangan di Kabupaten Probolinggo.
- Rencana tindak lanjut penyusunan Renja ini adalah sinkronisasi data dokumen dengan aplikasi SIPD Perencanaan.

Probolinggo, September 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Probolinggo

**H. YAHYADI, SP. MMA.**
Pembina Tk. I
NIP. 19660203 1989031 013

# RENCANA KERJA
# DINAS LINGKUNGAN HIDUP
# KABUPATEN PROBOLINGGO
# TAHUN 2026

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP
## KABUPATEN PROBOLINGGO

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo tahun 2026 dapat terselesaikan. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disusun atas dasar usulan program dan kegiatan setiap bidang serta memperhatikan usulan dari masyarakat wilayah Kabupaten Probolinggo melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Kerja tahun 2026 merupakan panduan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari RENSTRA tahun 2024-2026, transisi perencanaan yang akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dalam jangka waktu periode tahun 2026. Dokumen ini juga menggambarkan target sasaran dan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2026 serta arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkannya.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dapat digunakan sebagai informasi dan acuan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo tahun 2026.

Probolinggo, 29 Juli 2025

**KEPALA**
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**AGUS BUDIANTO, ST, M.Si**
NIP. 19721209 200312 1004

# DAFTAR ISI

Halaman

**KATA PENGANTAR** ..... i
**DAFTAR ISI** ..... ii
**BAB I PENDAHULUAN**
I.1. Latar Belakang .....1
I.2. Landasan Hukum ..... 2
I.3. Maksud dan Tujuan ..... 5
I.4. Sistematika Penulisan ..... 6
**BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU**
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capian Rencana Strategis PD ..... 8
II.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD.....27
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....29
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....31
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..49
**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....50
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD .....51
III.3. Program dan Kegiatan .....52
**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....63
**BAB V PENUTUP**
Penutup .....70

## DAFTAR TABEL


Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksnaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Probolinggo ……..……..……...…11

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....28

Tabel T-C.31 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2026 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD TA 2026 Kabupaten Probolinggo .....34

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hdup Kabupaten Probolinggo .....49

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 .....52

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.....50

Tabel 4.1 Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ……..…63

# BAB I
# PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RENSTRA 2025-2029. Dokumen RENJA memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Penyusunan RENJA 2026 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat.

## I.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang- undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005–2025;
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026;

## I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo 2026 yaitu untuk dijadikan dasar serta acuan Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengag Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta perkiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, yaitu :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan

yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;

3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.

## I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan dan Sasaran
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 secara umum selaras dengan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025. Hasil RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 agar program kegiatan dapat berjalan maksimal dan dapat memenuhi kinerja yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2025 (semester I) dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Realisasi Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja (dibawah 50%)**

Program Kegiatan dengan realisasi di bawah 50% rata-rata adalah kegiatan dari bidang-bidang, dimana pelaksanaannya mundur karena terkendala adanya pergeseran anggaran dan kendala-kendala teknis lainnya. Kegiatan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian 41,67% karena belum ada partisipasi masyarakat dan lembaga yang peduli dan memahami PPLH
2. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Capaian 0% karena kegiatan dilaksanakan mundur pada tribulan berikutnya.

3. Kegiatan RPPLH Kabupaten/Kota capaian 0% karena masih dalam proses penyusunan dokumen RPPLH
4. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan hidup Tingkat daerah kabupaten/kota capaian 0% karena penilaian kinerja Masyarakat/Lembaga dilakukan pada tribulan 3.
5. Kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota capaian 20% karena Upaya penanggulangan pencemaran yang dilakukan belum maksimal pada titik sumber pencemaran tersebut
6. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup Kabupaten/kota capaian 12,5% karena Upaya rehabilitasi di kabupaten/kota belum maksimal pelaksanaannya
7. Kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang usuran pemerintah daerah capaian 0% karena masih dalam proses pengajuan ke pejabat pengadaan barang dan jasa
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daeah capaian 25% karena masih dalam proses inventarisir barang-barang yang akan dilakukan perbaikan/perawatan pada kegiatan berikutnya

**b. Faktor-faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/kegiatan**

Faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan sebagai berikut :

- Kurangnya Koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan baik di internal Dinas Lingkungan Hidup maupun dengan pihak eksternal

- Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum sesuai dengan jadwal dan peraturan yang berlaku sehingga Pejabatn Pengadaan harus instens dalam berkoordinasi ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan pihak-pihak terkait.
- Adanya pergeseran anggaran, yang mewajibkan pelaksanaan kegiatan menunggu hingga penetapan DPA

Faktor yang menjadi terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan sebagai berikut :

- Waktu dan pelaksanaan kegiatan yang mencukupi sesuai dengan time schedule
- Motivasi, arahan dan bimbingan pimpinan serta pengambilan keputusan yang dilakukan piminan sehingga membantu optimalisasi target kinerja
- Koordinasi intensif dengan stakeholder terkait seperti masyarakat, lembaga masyarakat dan perangkat daerah dan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan

Berikut merupakan rekpitulasi evaluasi pelaksanaan RENJA dari tahun 2024-2025 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Probolinggo

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **25%** | **25%** |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase lembaga yang berpartisipasi dalam Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup** | **2,4%** | **2,4%** | **2,4%** | **2,4%** | **100%** | **2,4%** | **1,0%** | **41,67%** |
| | Subgiat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah SDM Lembaga/Kelompok Masyarakat yang memahami PPLH | 3 lembaga | 3 lembaga | 3 lembaga | 3 lembaga | 100% | 3 lembaga | 0 dok | 0% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Subgiat Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dok | 0 dok | 0% |
| | Subgiat Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup yang terlaksana | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 100% | 60 orang | 60 orang | 100% |
| | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) , KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT PPLH** | **Persentase peningkatan pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan Kearifan lokal dan MHA** | **8%** | **8%** | **8%** | **8%** | **100%** | **4,84%** | **0%** | **0%** |
| | **Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH** | **Persentase pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan Kearifan lokal dan MHA** | **4,84%** | **4,84%** | **4,84%** | **4,84%** | **100%** | **4,84%** | **0,00%** | **0%** |
| | Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH) | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dok | 0 dok | 0% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **(Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun)** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| | **Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | **Persentase Pemenuhan Data dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup yang terpenuhi** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| | Subgiat Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dok | 0 | 0% |
| | Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Subgiat Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang tersusun | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Persentase Peningkatan Ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup** | **3%** | **3%** | **3%** | **3%** | **100%** | **-** | **-** | **-** |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Prosentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap pemenuhan baku mutu air limbah** | - | - | - | - | - | 40% | 2,4% | 6,00% |
| | | **Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap pemenuhan baku mutu udara** | - | - | - | - | - | 20% | 1,2% | 6,00% |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | 60% | 60% | 60% | 60% | 100% | 10% | 10% | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | SubkegiatanPengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 30 badan usaha | 36 badan usaha | 30 badan usaha | 36 badan usaha | 120% | 25 badan udaha | 13 badan udaha | 52% |
| | Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan yang diterbitkan | 6 dokumen | 11 dokumen | 6 dokumen | 11 dokumen | 183,33% | 6 dok | 3dok | 50,00% |
| | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | **Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | **Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjutii** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | 5 pengaduan | 20 pengaduan | 5 pengaduan | 20 pengaduan | 400% | 5 pengaduan | 2 pengaduan | 40% |
| | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase peningkatan lembaga/kelompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0,0%** | **0%** |
| | **Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup** | **8,8%** | **8,8%** | **8,8%** | **8,8%** | **100%** | **8,80%** | **0,0%** | **0%** |
| | Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH | 1 entitas | 1 entitas | 1 entitas | 1 entitas | 100% | 1 entitas | 0 | 0% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase peningkatan upaya pengendalian, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup** | **23%** | **24,23%** | **23%** | **24,23%** | **105,35%** | **-** | **-** | **-** |
| | | **Persentase Mutu Udara dengan status Baik** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100%** | **50%** | **50,00%** |
| | | **Jumlah luasan lahan kritis yang terehabilitasi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 Ha** | **1,62%** | **32,40%** |
| | | **Persentase Mutu air dengan status minimal tercemar ringan** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **70%** | **35%** | **50,00%** |
| | **Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Persentase peningkatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota** | **25%** | **25,96%** | **25%** | **25,96%** | **103,84%** | **25%** | **15%** | **60,00%** |
| | Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah dokumen uji kualitas LH yang dilaksanakan terhadap media tanah,udara, air, dan laut | 34 dokumen | 34 dokumen | 34 dokumen | 34 dokumen | 100% | 50 dokumen | 22 dokumen | 44% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% | 24 dokumen | 12 dokumen | 50% |
| | **Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Persentase Peningkatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **20%** | **20%** | **20%** | **20%** | **100%** | **20%** | **4%** | **20%** |
| | Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang disampaikan kepada masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 5 titik | 5 titik | 5 titik | 5 titik | 100% | 5 titik | 1 titik | 4% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Persentase Peningkatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | **20%** | **20%** | **20%** | **20%** | **100%** | **16%** | **2%** | **12,5%** |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 100% | 7 kegiatan | 4 kegiatan | 57,14% |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Persentase Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **2%** | **0%** | **0%** |
| | **Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **Persentase RTH yang terpelihara** | **54,12%** | **54,12%** | **54,12%** | **54,12%** | **100%** | **60,00%** | **50,00%** | **80%** |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola | 70,6 Ha | 70,6 Ha | 70,6 Ha | 70,6 Ha | 100% | 70,6 Ha | 50 | 80% |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Persentase pengelolaan sampah (pelayanan)** | **23%** | **25,96%** | **23%** | **25,96%** | **112,87%** | **23%** | **11,11%** | **48,30%** |
| | Kegiatan Pengelolaan Sampah | **Persentase penanganan sampah** | **15%** | **15%** | **15%** | **15%** | **100%** | **15%** | **5,96%** | **39,73%** |
| | | **Persentase pengurangan sampah** | **8%** | **8%** | **8%** | **8%** | **100%** | **8%** | **5,15%** | **64,38%** |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali | 56 ton | 68 ton | 56 ton | 68 ton | 121,43% | 56,6 ton | 28,30 ton | 50,04% |
| | Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | 24.080 ton | 25.663 ton | 24.080 ton | 25.663 ton | 106,57% | 16.000 ton | 8.709,63 ton | 39,63% |
| | Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 2 unit | 6 unit | 2 unit | 6 unit | 300,00% | 11 unit | 6 unit | 54,55% |
| | Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | - | - | - | - | - | 24 unit | 12 unit | 50,00% |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah b3** | **8%** | **6,34%** | **8%** | **6,34%** | **79,25%** | **23%** | **7,50%** | **33%** |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3** | **Persentase peningkatan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan standar teknis penyimpanan limbah B3** | **30%** | **27,3%** | **30%** | **27,3%** | **91,00%** | **100%** | **50,0%** | **50,00%** |
| | Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 4 dokumen | 5 dokumen | 4 dokumen | 5 dokumen | 125% | 8 dokumen | 4 dokumen | 50% |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai SAKIP PD** | **5%** | **5%** | **5%** | **5%** | **100%** | **0,1%** | **0,19%** | **190%** |
| | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **50%** | **50%** |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dok | 1 dok | 50% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dok | 1 dok | 50% |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 100% | 2 lap | 2lap | 100% |
| | **Administrasi Keuangan** | **Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **50%** | **50%** |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 105 orang | 105 orang | 105 orang | 105 orang | 100% | 94 orang | 97 orang | 103,19% |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 12 dok | 6 dok | 50% |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 lap | 1 lap | 100% |
| | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan | Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 laporan | 18 laporan | 18 laporan | 18 laporan | 100% | 18 lap | 9 lap | 50% |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Kedisiplinan Pegawai** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **75%** | **75,00** |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah personil yang bersertifikasi di bidang lingkungan hidup | 1 orang | - | 1 orang | - | - | 3 orang | 3 orang | 100% |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlakasana** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **25%** | **25%** |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 2 paket | - | 0% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 4 paket | 1 paket | 25% |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 4 paket | 1 paket | 25% |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 12 paket | 6 paket | 50% |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 4 paket | 2 paket | 50% |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Jumlah pemenuhan bahan bacaan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 laporan | 6 laporan | 6 laporan | 6 laporan | 100% | 12 laporan | 6 laporan | 50% |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Terpenuhi** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 100% | 28 unit | 0 | 0% |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **50%** | **50%** |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 6 laporan | 50% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 6 laporan | 50% |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **25%** | **25%** |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 100% | 1 unit | - | 0% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 unit | 23 unit | 20 unit | 23 unit | 115% | 23 unit | 4 unit | 17,39% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023(n-3) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 33 unit | 8 unit | 24,24% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 100% | 2 unit | 0 | 0% |

## II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup berupaya melalui pelaksanaan program yang antara lain sebagai berikut :

a. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP,
b. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
c. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
d. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
e. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
f. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
g. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
h. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT PPLH
i. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
j. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
k. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINATAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dari upaya pencapaian tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yaitu berupa kualitas air, udara, dan lahan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan program-program diperoleh pencapaian realisasi sasaran dan indikator pengukuran antara lain sebagai berikut:

**Tabel T-C.30**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

| NO | INDIKATOR | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 62,86 | 74,77 | 74,85 | 74,93 | 61,56 | * | 74,85 | 74,93 | |
| 2 | Indeks Kualitas Air | 49,80 | 74,29 | 74,39 | 74,49 | 36,25 | 74,43 | 74,39 | 74,49 | |
| 3 | Indeks Kualitas Udara | 79,38 | 79,02 | 79,12 | 79,22 | 88,71 | 85,10 | 79,12 | 79,22 | |
| 4 | Indeks Kualitas Lahan | 54,75 | 67,73 | 67,73 | 67,73 | 54,82 | * | 67,73 | 67,73 | |
| 5 | Persentase pengelolaan sampah | 23,00 | 29,15 | 29,40 | 29,65 | 28,90 | 11,11 | 29,40 | 29,65 | |
| 6 | Persentase peningkatan nilai LHE AKIP | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,19% | | 0,05 | 0,05 | |

Ket: (*) penghitungan akan dilakukan di semester 2 2025

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah di atas, target indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2025 adalah sebesar 74,77. Pada semester I 2025, nilai IKLH belum dapat dihitung karena ada salah satu komponennya, yaitu IKL (Indeks Kualitas Lahan) yang nilainya masih akan diketahui di semester 2. Hal itu disebabkan karena penghitungan IKL menunggu angka kondisi tutupan hutan dari data citra satelit yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada akhir semester 2 2025. Sedang untuk komponen penghitung IKLH yang lain yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) masing masing bernilai 74,43 dan 85,10 . Angka sementara ini akan dihitung ulang pada akhir semester II tahun 2025.

Tahun 2024, capaian IKLH belum memenuhi target karena salah satu komponennya yang rendah yaitu Indeks Kualitas Air (IKA). Hal ini terjasi karena waktu pelaksanaan pemantauan kualitas air yang tidak sesuai dengan rencana dimana idealnya pemantauan kualitas air dalam 1 (satu)

tahun dilakukan saat musim hujan dan kemarau. Namun di Tahun 2024 seluruhnya dilakukan di musim kemarau. Hal ini terjadi karena jadwal pemantauan kualitas Air Semester I yang seharusnya dilakukan maksimal di Bulan Februari, bergeser hingga bulan April akibat kegiatan yang bersumber dari DAU Kesehatan yang belum bisa dilaksanakan. Di sisi lain, Musim hujan di awal tahun 2024 berakhir lebih cepat. Selain itu juga karena belum adanya sinergi yang optimal dalam pelaksanaan program Kali Bersih di Kabupaten Probolinggo.

Untuk persentase pengelolaan persampahan melebihi target yang ditentukan, karena adanya perubahan metode di perhitungan dan penambahan item komponen lokasi kegiatan dalam hal pengurangan sampah yaitu pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang sampah.

## II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

**Faktor Kekuatan :**

a. Tersedianya dana APBD dibidang lingkungan hidup;
b. Adanya peraturan-peraturan yang mengatur bidang lingkungan hidup;
c. Tersedianya PPLHD dan PPNS sebagai instrument pengawasan;
d. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung;

**Faktor Kelemahan :**

a. Tenaga Ahli Pemrosesan secara Sanitary Landfill masih terbatas, perlunya perluasan kolam landfill,
b. Kurangnya armada/dumptruk, kurangnya sarana prasarana perlengkapan pengangkutan persampahan yang dilengkapi dengan kecanggihan teknologi, serta kurangnya alat berat buldozer maupun excavator

c. Belum tersedianya Lab. Lingkungan yang terakreditasi untuk uji udara di daerah sehingga pengujian kualitas lingkungan dilakukan di luar daerah yang berimplikasi kepada alokasi anggaran,
d. Kurangnya sarana prasarana labolatorium lingkungan dan pemeliharaan ala-alat laboratorium lingkungan,
e. Kurangnya personil teknis yg menguasai terkait kegiatan pengawasan lingkungan hidup, sehingga kegiatan tidak maksimal,
f. Pengaduan masyarakat bersifat pasif atau menunggu laporan dari masyarakat dan masih ada beberapa pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan penanganan instansi lain yg masuk ke DLH (bukan kasus LH),
g. Kurangnya SDM di bidang Analisis Dampak Lingkungan Hidup

**Faktor Tantangan :**

a. Semakin bertambahnya jumlah dan jenis usaha dan/atau kegiatan
b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk dan dunia usaha turut serta menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan
c. Meningkatnya laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk
d. Meningkatnya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman/lainnya
e. Laju pencemaran dan perusakan lingkungan yang tidak sebanding dengan upaya pengendalian dan pemulihan
f. Banyaknya polusi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga/memelihara taman/RTH,
g. Kesulitan mengajak sekolah-sekolah untuk ber-adiwiyata karena tidak ada "keharusan" dari pemerintah dan tidak ada REWARD,
h. Pengumpulan data dari beberapa instansi kadang tidak tepat waktu, sehingga pengerjaan dokumen juga mundur serta

kesulitan pengerjaan dokumen karena tidak didampingi konsultan.

**Faktor Peluang :**

a. Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang lingkungan hidup baik dari pemerintah pusat maupun provinsi
b. Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan industri dan masyarakat seperti program ADIPURA, ADIWIYATA, dll
c. Adanya sektor Dukungan penyelenggaraan pelatihan dibidang lingkungan hidup dari KLH
d. Adanya program CSR perusahaan yang mendukung pengelolaan lingkungan

Dari faktor-faktor diatas, Dinas Lingkungan Hidup mengangkat beberapa isu strategis, antara lain sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten;
b. Belum optimalnya perlindungan terhadap sumber-sumber mata air sehingga status mutu air sungai (air badan air) masih rendah;
c. Belum tercapainya persentase luasan Ruang Terbuka Hijau;
d. Tingginya potensi pencemaran terhadap lingkungan;
e. Masih Rendahnya pertisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
f. Rendahnya kuantitas dan kualitas data lingkungan hidup;
g. Belum optimalnya operasional laboratorium lingkungan;
h. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

## II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pertimbangan untuk menetukan prioritas pembangunan. Adapun permasalahan di bidang lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Masih minimnya peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan, utamanya dalam hal pendauran ulang;
2. Kurangnya sarana dan prasarana perlengkapan pengangkutan persampahan antara lain armada/ dump truk;
3. Menurunnya kualitas air, khususnya air sungai oleh limbah rumah tangga, fasilitas umum/social, industry, dan bahan kimia dari pengelolaan lahan pertanian;
4. Meningkatnya pencemaran tanah oleh sampah sebagai akibat pertumbuhan perumahan dan pusat – pusat baru kegiatan masyarakat;
5. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas udara akibat meningkatnya pengguna kendaraan bermotor dan berkurangnya penghijauan;

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan dalam prioritas pembangunan, Kabupaten Probolinggo menetapkan tema pembangunan untuk tahun 2026 yaitu

**““Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Kawasan Strategis Yang Didukung Oleh Pemenuhan Infrastruktur Berkelanjutan dan Peningkatan Produksi Pangan””**,

yang difokuskan pada 8 (delapan) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola dan Layanan Publik yang Bersih dan Akuntabel
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Miskin
4. Peningkatan Ketahanan daerah
5. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Basis
6. Peningkatan Ketahanan Pangan
7. Peningkatan Realisasi Investasi
8. Penyediaan Layanan Infrastruktur Yang Berkualitas

Dari ke-8 prioritas pembangungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tupoksi serta program dan kegiatan yang telah dirancang dalam

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 maka program prioritas yang bisa didukung Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini adalah prioritas Pembangunan Kabupaten ke-8, yakni Penyediaan Layanan Infrastruktur Yang Berkualitas .

Dalam mendukung prioritas pembangunan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menjabarkannya ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Nomenklatur yang terdapat pada permendagri nomor 90 tahun 2019, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel T-C.31

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2026

Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD TA 2026

Kabupaten Probolinggo

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah**<br>**Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah** | **100%** | **16.716.955.150** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah**<br>**Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah** | **100%** | **18.443.030.835** | |
| 2 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun** | **100%** | **21.246.084** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun** | **100%** | **60.000.000** | |
| 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 9.332.685 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 20.000.000 | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 5.378.421 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 20.000.000 | |
| 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 6.534.978 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 20.000.000 | |
| 6 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu** | **100%** | **12.377.283.875** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu** | **100%** | **12.504.269.155** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 94 Orang/bulan | 12.363.433.155 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 94 Orang/bulan | 12.459.269.155 | |
| 8 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 3.198.200 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 15.000.000 | |
| 9 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 4.230.520 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 15.000.000 | |
| 10 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 6.422.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 15.000.000 | |
| 11 | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | **persentase laporan realisasi PAD tersusun** | **100%** | **7.000.000** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | **persentase laporan realisasi PAD tersusun** | **100%** | **50.000.000** | |
| 12 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 7.000.000 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 50.000.000 | |
| 13 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Presentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan** | **100%** | **10.000.000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Presentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan** | **100%** | **100.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 10.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 100.000.000 | |
| 15 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa** | **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana** | **100%** | **450.841.915** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa** | **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana** | **100%** | **595.000.000** | |
| 16 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 6.769.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 10.000.000 | |
| 17 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 85.822.725 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 125.000.000 | |
| 18 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 8.964.400 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 15.000.000 | |
| 19 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 172.277.600 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 180.000.000 | |
| 20 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 12.008.190 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 15.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 165.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 250.000.000 | |
| 22 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Persentase Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Terpenuhi** | **100%** | **30.000.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Persentase Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Terpenuhi** | **100%** | **250.000.000** | |
| 23 | Pengadaan Mebel | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 7 Unit | 10.000.000 | Pengadaan Mebel | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 7 Unit | 50.000.000 | |
| 24 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 28 Unit | 20.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 28 Unit | 200.000.000 | |
| 25 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1** | **3.563.521.995** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1** | **4.411.261.680** | |
| 26 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 133.260.315 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 220.000.000 | |
| 27 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3.430.261.680 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 4.191.261.680 | |
| 28 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara** | **100%** | **257.061.281** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara** | **100%** | **472.500.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 22.500.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 22.500.000 | |
| 30 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 21 Unit | 153.340.681 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 21 Unit | 200.000.000 | |
| 31 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 Unit | 31.220.600 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 Unit | 50.000.000 | |
| 32 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 50.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 200.000.000 | |
| 33 | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa** | **Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun** | **100%** | **60.000.000** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa** | **Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun** | **100%** | **650.000.000** | |
| 34 | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | | **Persentase Dokumen RPPLH yang tersusun** | **100%** | **60.000.000** | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | | **Persentase Dokumen RPPLH yang tersusun** | **100%** | **150.000.000** | |
| 35 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 60.000.000 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 150.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **36** | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Dokumen KLHS yang Disusun** | **100,00%** | **-** | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Dokumen KLHS yang Disusun** | **100,00%** | **500.000.000** | |
| **37** | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 0 Dokumen | - | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 0 Dokumen | 200.000.000 | |
| **38** | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | 0 Dokumen | - | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | 0 Dokumen | 300.000.000 | |
| **39** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | **Prosentase jumlah titik pantau air permukaan status mutu minimal tercemar ringan<br>Prosentase jumlah titik pantau udara ambien status mutu baik<br>Jumlah lahan kritis yang terehabilitasi** | **40 %<br>100 %<br>2 Ha** | **825.000.000** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | **Prosentase jumlah titik pantau air permukaan status mutu minimal tercemar ringan<br>Prosentase jumlah titik pantau udara ambien status mutu baik<br>Jumlah lahan kritis yang terehabilitasi** | **40 %<br>100 %<br>2 Ha** | **1.500.000.000** | |
| **40** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | **Persentase penyelesaian pengujian labolatorium lingkungan<br>Persentase titik pantau air dan udara yang memenuhi baku mutu lingkungan<br>Jumlah desa binaan kampung iklim** | **100 %<br>60 %<br>4 Desa** | **750.000.000** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | **Persentase penyelesaian pengujian labolatorium lingkungan<br>Persentase titik pantau air dan udara yang memenuhi baku mutu lingkungan<br>Jumlah desa binaan kampung iklim** | **100 %<br>60 %<br>4 Desa** | **1.300.000.000** | |
| **41** | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 3 Dokumen | 60.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 3 Dokumen | 100.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun | 4 Laporan | 75.000.000 | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun | 4 Laporan | 350.000.000 | |
| 43 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | 46 Lokasi | 200.000.000 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | 46 Lokasi | 50.000.000 | |
| 44 | Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim | 2 Laporan | 65.000.000 | Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim | 2 Laporan | 50.000.000 | |
| 45 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 12 Dokumen | 350.000.000 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 12 Dokumen | 750.000.000 | |
| **46** | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | **Jumlah perusahaan / industri non proper yang telah dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup** | **5 Titik** | **50.000.000** | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | **Jumlah perusahaan / industri non proper yang telah dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup** | **5 Titik** | **100.000.000** | |
| 47 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 5 Titik | 50.000.000 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 5 Titik | 100.000.000 | |
| **48** | **Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan** | **7 Kegiatan** | **25.000.000** | **Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan** | **7 Kegiatan** | **100.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 7 Kegiatan | 25.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 7 Kegiatan | 100.000.000 | |
| **50** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | **Persentase Peningkatan tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan** | **2 %** | **500.000.000** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | **Persentase Peningkatan tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan** | **2 %** | **550.000.000** | |
| **51** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | | **Persentase RTH kewenangan Kab/kota yang terpelihara** | **60 %** | **500.000.000** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | | **Persentase RTH kewenangan Kab/kota yang terpelihara** | **60 %** | **550.000.000** | |
| 52 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 70,6 Ha | 400.000.000 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 70,6 Ha | 500.000.000 | |
| 53 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | 0,5 Unit | 100.000.000 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | 0,5 Unit | 50.000.000 | |
| **54** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | **Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah B3** | **10 %** | **50.000.000** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | **Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah B3** | **10 %** | **75.000.000** | |
| **55** | **Penyimpanan sementara Limbah B3** | | **Persentase fasilitasi pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3** | **100 %** | **50.000.000** | **Penyimpanan sementara Limbah B3** | | **Persentase fasilitasi pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3** | **100 %** | **75.000.000** | |
| 56 | Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | 10 Dokumen | 50.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | 10 Dokumen | 75.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **57** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | **Prosentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup** | **51 %** | **20.000.000** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | **Prosentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup** | **51 %** | **185.000.000** | |
| **58** | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha / persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah** | **10 %** | **20.000.000** | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha / persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah** | **10 %** | **185.000.000** | |
| **59** | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 6 Dokumen | 10.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 6 Dokumen | 50.000.000 | |
| **60** | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | 0 Orang | - | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | 4 Orang | 30.000.000 | |
| **61** | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | 0 Orang | - | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | 3 Orang | 30.000.000 | |
| **62** | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 50 Badan Usaha | 10.000.000 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 50 Badan Usaha | 75.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **63** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | **Persentase peningkatan pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan MHA** | **4,84 %** | **10.000.000** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | **Persentase peningkatan pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan MHA** | **4,84 %** | **50.000.000** | |
| **64** | **Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH** | | **Persentase pengakuan MHA /Kearifan lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** | **100 %** | **10.000.000** | **Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH** | | **Persentase pengakuan MHA /Kearifan lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** | **100 %** | **50.000.000** | |
| **65** | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 1 Dokumen | 10.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| **66** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | **Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan** | **100 %** | **300.000.000** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | **Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan** | **100 %** | **225.000.000** | |
| **67** | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase lembaga yang berpartisipasi dalam Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup** | **0,024** | **300.000.000** | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase lembaga yang berpartisipasi dalam Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup** | **0,024** | **225.000.000** | |
| **68** | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 150.000.000 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 75.000.000 | |
| **69** | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 100 Orang | 100.000.000 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 100 Orang | 75.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 70 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 2 Lembaga | 50.000.000 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 2 Lembaga | 75.000.000 | |
| 71 | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | **Persentase peningkatan lembaga/kelompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten** | **100 %** | **10.000.000** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | **Persentase peningkatan lembaga/kelompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten** | **100 %** | **150.000.000** | |
| 72 | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup** | **8,8 %** | **10.000.000** | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup** | **8,8 %** | **150.000.000** | |
| 73 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 1 Entitas | 10.000.000 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 1 Entitas | 150.000.000 | |
| 74 | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | **Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan** | **100 %** | **10.000.000** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | **Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan** | **100 %** | **100.000.000** | |
| 75 | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | | **Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti** | **100 %** | **10.000.000** | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | | **Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti** | **100 %** | **100.000.000** | |
| 76 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | 5 Pengaduan | 10.000.000 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | 5 Pengaduan | 100.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **77** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | **Persentase penanganan sampah<br>Persentase Pengurangan sampah** | **15,81 %<br>13,59 %** | **1.455.000.000** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | **Persentase penanganan sampah<br>Persentase Pengurangan sampah** | **15,81 %<br>13,59 %** | **3.800.000.000** | |
| **78** | **Pengelolaan Sampah** | | **Jumlah pelayanan pengelolaan sampah** | **49956 Ton** | **1.455.000.000** | **Pengelolaan Sampah** | | **Jumlah pelayanan pengelolaan sampah** | **49956 Ton** | **3.800.000.000** | |
| **79** | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 2 Unit | 580.000.000 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 2 Unit | 1.000.000.000 | |
| **80** | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | 32 Unit | 300.000.000 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | 32 Unit | 1.000.000.000 | |
| **81** | Penanganan sampah melalui pengangkutan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | 26873 Ton | 550.000.000 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | 26873 Ton | 1.500.000.000 | |
| **82** | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah | 0 Dokumen | - | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah | 0 Dokumen | 150.000.000 | |
| **83** | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah sampah yang terdaur ulang | 23082 Ton | 25.000.000 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah sampah yang terdaur ulang | 23082 Ton | 150.000.000 | |
| **84** | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Persentase luas layanan pengumpulan sampah | 0% | - | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Persentase luas layanan pengumpulan sampah | 0% | - | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 85 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 0 Ton | - | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 0 Ton | - | |
| 86 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 0 Ton | - | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 0 Ton | - | |
| | | | | | **19.956.955.149,74** | | | | | **25.728.030.835** | |

## II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses Perencanaan program dan kegiatan tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu prediksi kebutuhan pembangunan internal perangkat daerah, penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), usulan proposal bantuan hibah yang disampaikan dalam forum Musrenbang, serta kewenangan yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun usulan program dan kegiatan yang mengacu pada penelaahan pemangku kepentingan, tersaji dalam tabel berikut

**Tabel T-C.32**
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026**
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
**Kabupaten Probolinggo**

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | Persentase peningkatan penanganan sampah | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Sampah | | Persentase penanganan sampah | | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 2 unit | usulan masyarakat (roda tiga pengangkut sampah ) dan tempat sampah beroda (Aspirasi desa) |
| | | Desa Sukodadi<br><br>Kec Paiton<br><br>Desa Sidopekso KKec Kraksaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 2 unit | Usulan roda tiga pengangkut sampah untuk kec Kraksaan (POKIR) |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | Persentase Peningkatan tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan | | |
| | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | Persentase RTH kewenangan Kab/kota yang terpelihara | | |
| | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Desa Maron wetan Kec Maron | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 unit | Pembangunan taman di Kecamatan Maron (POKIR) |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2025-2029 belum tersedia secara publik dalam bentuk dokumen tunggal yang komprehensif, oleh karena itu harapan dan permasalahan dalam beberapa waktu terakhir di Kementerian Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024, yang memiliki visi yaitu **"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat "** untuk mendukung: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".**

Kemudian dari visi yang sudah ditetapkan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai misi yang nantinya akan diusung dalam periode 2020-2024, antara lain:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas ;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan ;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, antara lain:

1. TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN YANG BERKUALITAS SERTA TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM
2. TERCAPAINYA OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN SESUAI DENGAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
3. TERJAGANYA KEBERADAAN, FUNGSI DAN DISTRIBUSI MANFAAT HUTAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN
4. TERSELENGGARANYA TATA KELOLA & INOVASI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG BERORIENTASI DAYA SAING

Dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang akan dicapai Tahun 2020-2024, dapat dijabarkan tahapan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dicapai pada Tahun 2025, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo mengambil prioritas pada sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim.

## III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 yang terkait dengan urusan lingkungan hidup yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Meningkatkan Kesempatan

Kerja di Dukung Infrastruktur Berkelanjutan. Sedangkan sasaranya adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran:

- Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Lahan Secara berkelanjutan
- Meningkatnya pengelolaan sampah

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikatornya, dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2026**

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET TH 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | | Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 74,85 |
| | | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Lahan secara berkelanjutan | Indeks Kualitas Air | 74,39 |
| | | | Indeks Kualitas Udara | 79,12 |
| | | | Indeks Kualitas Lahan | 67,73 |
| | | Meningkatnya pengelolaan sampah | Presentase pengelolaan sampah | 29,40 |

## III.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo akan melaksanakan 11 program sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH;
2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP;
4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI);
5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3);
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH);
7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT;
8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT;
9. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT ;
10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP;
11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Dari 11 program diatas, diturunkan menjadi 20 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;

9. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
10. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
11. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;
12. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
13. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
15. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
16. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
17. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten/kota;
18. Pengelolaan Sampah
19. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
20. Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Adapun lebih jelasnya untuk program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 sesuai dengan permendagri nomor 90 tahun 2019 lengkap beserta indikator, target, dan pendanaannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Kabupaten Probolinggo | 78,64 | 16.716.955.150 | DAU | | 78,68 | 21.732.041.695 |
| 2 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun | Kabupaten Probolinggo | 100% | 21.246.084 | DAU | | 100% | 27.619.909 |
| 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Probolinggo | 2 Dokumen | 9.332.685 | DAU | | 2 Dokumen | 12.132.491 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kabupaten Probolinggo | 2 Dokumen | 5.378.421 | DAU | | 2 Dokumen | 6.991.947 |
| 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kabupaten Probolinggo | 2 Laporan | 6.534.978 | DAU | | 2 Laporan | 8.495.471 |
| 6 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu | | 100% | 12.377.283.875 | DAU | | 100% | 16.090.469.038 |
| 7 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Probolinggo | 94 Orang/bulan | 12.363.433.155 | DAU | | 94 Orang/bulan | 16.072.463.102 |
| 8 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kabupaten Probolinggo | 12 Dokumen | 3.198.200 | DAU | | 12 Dokumen | 4.157.660 |
| 9 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kabupaten Probolinggo | 1 Laporan | 4.230.520 | DAU | | 1 Laporan | 5.499.676 |
| 10 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kabupaten Probolinggo | 18 Laporan | 6.422.000 | DAU | | 18 Laporan | 8.348.600 |
| 11 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | persentase laporan realisasi PAD tersusun | Kabupaten Probolinggo | 100% | 7.000.000 | DAU | | 100% | 9.100.000 |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif |
| 12 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kabupaten Probolinggo | 12 Dokumen | 7.000.000 | DAU | | 12 Dokumen | 9.100.000 |
| 13 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kabupaten Probolinggo | 100% | 10.000.000 | DAU | | 100% | 13.000.000 |
| 14 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kabupaten Probolinggo | 5 Orang | 10.000.000 | DAU | | 5 Orang | 13.000.000 |
| 15 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana | Kabupaten Probolinggo | 100% | 450.841.915 | DAU | | 100% | 586.094.490 |
| 16 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kabupaten Probolinggo | 2 Paket | 6.769.000 | DAU | | 2 Paket | 8.799.700 |
| 17 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kabupaten Probolinggo | 2 Paket | 85.822.725 | DAU | | 2 Paket | 111.569.543 |
| 18 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kabupaten Probolinggo | 2 Paket | 8.964.400 | DAU | | 2 Paket | 11.653.720 |
| 19 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kabupaten Probolinggo | 12 Paket | 172.277.600 | DAU | | 12 Paket | 223.960.880 |
| 20 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kabupaten Probolinggo | 4 Paket | 12.008.190 | DAU | | 4 Paket | 15.610.647 |
| 21 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Probolinggo | 12 Laporan | 165.000.000 | DAU | | 12 Laporan | 214.500.000 |
| 22 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Terpenuhi | Kabupaten Probolinggo | 100% | 30.000.000 | DAU | | 100% | 39.000.000 |
| 23 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kabupaten Probolinggo | 7 Unit | 10.000.000 | DAU | | 7 Unit | 13.000.000 |
| 24 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kabupaten Probolinggo | 28 Unit | 20.000.000 | DAU | | 28 Unit | 26.000.000 |
| 25 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Probolinggo | 1 | 3.563.521.995 | DAU | | 1 | 4.632.578.594 |
| 26 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kabupaten Probolinggo | 12 Laporan | 133.260.315 | DAU | | 12 Laporan | 173.238.410 |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif |
| 27 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kabupaten Probolinggo | 12 Laporan | 3.430.261.680 | DAU | | 12 Laporan | 4.459.340.184 |
| 28 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | Kabupaten Probolinggo | 100% | 257.061.281 | DAU | | 100% | 334.179.665 |
| 29 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kabupaten Probolinggo | 1 Unit | 22.500.000 | DAU | | 1 Unit | 29.250.000 |
| 30 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kabupaten Probolinggo | 21 Unit | 153.340.681 | DAU | | 21 Unit | 199.342.885 |
| 31 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kabupaten Probolinggo | 18 Unit | 31.220.600 | DAU | | 18 Unit | 40.586.780 |
| 32 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kabupaten Probolinggo | 2 Unit | 50.000.000 | DAU | | 2 Unit | 65.000.000 |
| 33 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun | Kabupaten Probolinggo | 100% | 60.000.000 | DAU | | 100% | 78.000.000 |
| 34 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Persentase Dokumen RPPLH yang tersusun | | 100% | 60.000.000 | DAU | | 100% | 78.000.000 |
| 35 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | 1 Dokumen | 60.000.000 | DAU | | 1 Dokumen | 78.000.000 |
| 36 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Prosentase jumlah titik pantau air permukaan status mutu minimal tercemar ringan<br>Prosentase jumlah titik pantau udara ambien status mutu baik<br>Jumlah lahan kritis yang terehabilitasi | Kabupaten Probolinggo | 40 %<br>100 %<br>2 Ha | 825.000.000 | DAU | | 40 %<br>100 %<br>2 Ha | 1.072.500.000 |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif |
| 37 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase penyelesaian pengujian labolatorium lingkungan<br>Persentase titik pantau air dan udara yang memenuhi baku mutu lingkungan<br>Jumlah desa binaan kampung iklim | Kabupaten Probolinggo | 100 %<br>60 %<br>4 Desa | 750.000.000 | DAU | | 100 %<br>60 %<br>4 Desa | 975.000.000 |
| 38 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Kabupaten Probolinggo | 3 Dokumen | 60.000.000 | DAU | | 3 Dokumen | 78.000.000 |
| 39 | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun | Kabupaten Probolinggo | 4 Laporan | 75.000.000 | DAU | | 4 Laporan | 97.500.000 |
| 40 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | Kabupaten Probolinggo | 46 Lokasi | 200.000.000 | DAU | | 46 Lokasi | 260.000.000 |
| 41 | Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim | Kabupaten Probolinggo | 2 Laporan | 65.000.000 | DAU | | 2 Laporan | 84.500.000 |
| 42 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | Kabupaten Probolinggo | 12 Dokumen | 350.000.000 | DAU | | 12 Dokumen | 455.000.000 |
| 43 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan / industri non proper yang telah dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | Kabupaten Probolinggo | 5 Titik | 50.000.000 | DAU | | 5 Titik | 65.000.000 |
| 44 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | Kabupaten Probolinggo | 5 Titik | 50.000.000 | DAU | | 5 Titik | 65.000.000 |
| 45 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan | Kabupaten Probolinggo | 7 Kegiatan | 25.000.000 | DAU | | 7 Kegiatan | 32.500.000 |
| 46 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | Kabupaten Probolinggo | 7 Kegiatan | 25.000.000 | DAU | | 7 Kegiatan | 32.500.000 |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif |
| 47 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Peningkatan tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan | Kabupaten Probolinggo | 2 % | 500.000.000 | DAU | | 2 % | 650.000.000 |
| 48 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Persentase RTH kewenangan Kab/kota yang terpelihara | Kabupaten Probolinggo | 60 % | 500.000.000 | DAU | | 60 % | 650.000.000 |
| 49 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Probolinggo | 70,6 Ha | 400.000.000 | DAU | | 70,6 Ha | 520.000.000 |
| 50 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | Kabupaten Probolinggo | 0,5 Unit | 100.000.000 | DAU | | 0,5 Unit | 130.000.000 |
| 51 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah B3 | Kabupaten Probolinggo | 10 % | 50.000.000 | DAU | | 10 % | 65.000.000 |
| 52 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | Persentase fasilitasi pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3 | Kabupaten Probolinggo | 100 % | 50.000.000 | DAU | | 100 % | 65.000.000 |
| 53 | Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Kabupaten Probolinggo | 10 Dokumen | 50.000.000 | DAU | | 10 Dokumen | 65.000.000 |
| 54 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Prosentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup | Kabupaten Probolinggo | 51 % | 20.000.000 | DAU | | 51 % | 26.000.000 |
| 55 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha / persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah | Kabupaten Probolinggo | 10 % | 20.000.000 | DAU | | 10 % | 26.000.000 |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif |
| 56 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Kabupaten Probolinggo | 6 Dokumen | 10.000.000 | DAU | | 6 Dokumen | 13.000.000 |
| 57 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Kabupaten Probolinggo | 50 Badan Usaha | 10.000.000 | DAU | | 50 Badan Usaha | 13.000.000 |
| 58 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase peningkatan pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan MHA | Kabupaten Probolinggo | 4,84 % | 10.000.000 | DAU | | 4,84 % | 13.000.000 |
| 59 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Persentase pengakuan MHA /Kearifan lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kabupaten Probolinggo | 100 % | 10.000.000 | DAU | | 100 % | 13.000.000 |
| 60 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Kabupaten Probolinggo | 1 Dokumen | 10.000.000 | DAU | | 1 Dokumen | 13.000.000 |
| 61 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan | Kabupaten Probolinggo | 100 % | 300.000.000 | DAU | | 100 % | 390.000.000 |
| 62 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga yang berpartisipasi dalam Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup | Kabupaten Probolinggo | 0,024 | 300.000.000 | DAU | | 0,024 | 390.000.000 |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif |
| 63 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Kabupaten Probolinggo | 1 Dokumen | 150.000.000 | DAU | | 1 Dokumen | 195.000.000 |
| 64 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | Kabupaten Probolinggo | 100 Orang | 100.000.000 | DAU | | 100 Orang | 130.000.000 |
| 65 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | Kabupaten Probolinggo | 2 Lembaga | 50.000.000 | DAU | | 2 Lembaga | 65.000.000 |
| 66 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase peningkatan lembaga/kelompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten | Kabupaten Probolinggo | 100 % | 10.000.000 | DAU | | 100 % | 13.000.000 |
| 67 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup | Kabupaten Probolinggo | 8,8 % | 10.000.000 | DAU | | 8,8 % | 13.000.000 |
| 68 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Kabupaten Probolinggo | 1 Entitas | 10.000.000 | DAU | | 1 Entitas | 13.000.000 |
| 69 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan | Kabupaten Probolinggo | 100 % | 10.000.000 | DAU | | 100 % | 13.000.000 |
| 70 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti | Kabupaten Probolinggo | 100 % | 10.000.000 | DAU | | 100 % | 13.000.000 |
| 71 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | Kabupaten Probolinggo | 5 Pengaduan | 10.000.000 | DAU | | 5 Pengaduan | 13.000.000 |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif |
| 72 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase penanganan sampah<br>Persentase Pengurangan sampah | Kabupaten Probolinggo | 15,81 %<br>13,59 % | 1.455.000.000 | DAU | | 15,81 %<br>13,59 % | 1.891.500.000 |
| 73 | Pengelolaan Sampah | Jumlah pelayanan pengelolaan sampah | Kabupaten Probolinggo | 49956 Ton | 1.455.000.000 | DAU | | 49956 Ton | 1.891.500.000 |
| 74 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Kabupaten Probolinggo | 2 Unit | 580.000.000 | DAU | | 2 Unit | 754.000.000 |
| 75 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | Kabupaten Probolinggo | 32 Unit | 300.000.000 | DAU | | 32 Unit | 390.000.000 |
| 76 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | Kabupaten Probolinggo | 26873 Ton | 550.000.000 | DAU | | 26873 Ton | 715.000.000 |
| 77 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | Jumlah sampah yang terdaur ulang | Kabupaten Probolinggo | 23082 Ton | 25.000.000 | DAU | | 23082 Ton | 32.500.000 |
| 78 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | Persentase luas layanan pengumpulan sampah | Kabupaten Probolinggo | 0% | - | DAU | | 0% | - |
| 79 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Kabupaten Probolinggo | 0 Ton | - | DAU | | 0 Ton | - |
| 80 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Kabupaten Probolinggo | 0 Ton | - | DAU | | 0 Ton | - |
| | | | | | **19.956.955.150** | | | | **25.944.041.695** |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program kerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Probolinggo yang harus diselaraskan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | |
| | | | | | |
| 1 | ***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*** | ***Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah*** | 78,64 | ***Rp16.716.955.150*** | |
| 2 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun** | 100% | **Rp21.246.084** | |
| 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Rp9.332.685 | |
| 4 | ***Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*** | ***Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*** | 2 Dokumen | ***Rp5.378.421*** | |
| 5 | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | 2 Laporan | **Rp6.534.978** | |
| 6 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu | 1 | Rp12.377.283.875 | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | |
| | | | | | |
| 7 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 94 Orang/bulan | Rp12.363.433.155 | |
| 8 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | Rp3.198.200 | |
| 9 | ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*** | ***Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*** | 1 Laporan | ***Rp4.230.520*** | |
| 10 | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD** | **Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD** | 18 Laporan | **Rp6.422.000** | |
| 11 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | persentase laporan realisasi PAD tersusun | 1 | Rp7.000.000 | |
| 12 | **Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah** | **Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah** | 12 Dokumen | **Rp7.000.000** | |
| 13 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 | Rp10.000.000 | |
| 14 | ***Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*** | ***Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*** | 5 Orang | ***Rp10.000.000*** | |
| 15 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana** | 100,0% | **Rp450.841.915** | |
| 16 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Rp6.769.000 | |
| 17 | ***Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*** | ***Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*** | 2 Paket | ***Rp85.822.725*** | |
| 18 | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan** | 2 Paket | **Rp8.964.400** | |
| 19 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Rp172.277.600 | |
| 20 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | Rp12.008.190 | |
| 21 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Rp165.000.000 | |
| 22 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Terpenuhi** | 100% | **Rp30.000.000** | |
| 23 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 7 Unit | Rp10.000.000 | |
| 24 | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan** | 28 Unit | **Rp20.000.000** | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | |
| | | | | | |
| 25 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Rp3.563.521.995 | |
| 26 | ***Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*** | ***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*** | 12 Laporan | ***Rp133.260.315*** | |
| 27 | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan** | 12 Laporan | **Rp3.430.261.680** | |
| 28 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | 1 | Rp257.061.281 | |
| 29 | ***Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*** | ***Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*** | 1 Unit | ***Rp22.500.000*** | |
| 30 | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya** | 21 Unit | **Rp153.340.681** | |
| 31 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 Unit | Rp31.220.600 | |
| 32 | ***Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*** | ***Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*** | 2 Unit | ***Rp50.000.000*** | |
| 33 | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun** | 100% | **Rp60.000.000** | |
| 34 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Persentase Dokumen RPPLH yang tersusun | 100% | Rp60.000.000 | |
| 35 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Rp60.000.000 | |
| 36 | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Prosentase jumlah titik pantau air permukaan status mutu minimal tercemar ringan**<br>**Prosentase jumlah titik pantau udara ambien status mutu baik**<br>**Jumlah lahan kritis yang terehabilitasi** | 40 %<br>100 %<br>2 Ha | **Rp825.000.000** | |
| 37 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase penyelesaian pengujian labolatorium lingkungan<br>Persentase titik pantau air dan udara yang memenuhi baku mutu lingkungan<br>Jumlah desa binaan kampung iklim | 100 %<br>60 %<br>4 Desa | Rp750.000.000 | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | |
| | | | | | |
| 38 | *Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim* | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | 3 Dokumen | *Rp60.000.000* | |
| 39 | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun | 4 Laporan | Rp75.000.000 | |
| 40 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | 46 Lokasi | Rp200.000.000 | |
| 41 | **Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota** | **Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim** | 2 Laporan | **Rp65.000.000** | |
| 42 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 12 Dokumen | Rp350.000.000 | |
| 43 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan / industri non proper yang telah dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | 5 Titik | Rp50.000.000 | |
| 44 | **Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | **Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan** | 5 Titik | **Rp50.000.000** | |
| 45 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan | 7 Kegiatan | Rp25.000.000 | |
| 46 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 7 Kegiatan | Rp25.000.000 | |
| 47 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | Persentase Peningkatan tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan | 2 % | Rp500.000.000 | |
| 48 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Persentase RTH kewenangan Kab/kota yang terpelihara | 60 % | Rp500.000.000 | |
| 49 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 70,6 Ha | Rp400.000.000 | POKIR pembangunan taman di kec Maron |
| 50 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | 0,5 Unit | Rp100.000.000 | |
| 51 | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah B3** | 10 % | **Rp50.000.000** | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | |
| | | | | | |
| 52 | **Penyimpanan sementara Limbah B3** | **Persentase fasilitasi pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3** | **100 %** | **Rp50.000.000** | |
| 53 | Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | 10 Dokumen | Rp50.000.000 | |
| 54 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Prosentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup | 51 % | Rp20.000.000 | |
| 55 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha / persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah | 10 % | Rp20.000.000 | |
| 56 | **Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH** | **Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan** | 6 Dokumen | **Rp10.000.000** | |
| 57 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 50 Badan Usaha | Rp10.000.000 | |
| 58 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase peningkatan pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan MHA | 4,84 % | Rp10.000.000 | |
| 59 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Persentase pengakuan MHA /Kearifan lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 100 % | **Rp10.000.000** | |
| 60 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 1 Dokumen | Rp10.000.000 | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | |
| | | | | | |
| 61 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan | 100 % | Rp300.000.000 | |
| 62 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga yang berpartisipasi dalam Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup | 2% | Rp300.000.000 | |
| 63 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | Rp150.000.000 | |
| 64 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 100 Orang | Rp100.000.000 | |
| 65 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 2 Lembaga | Rp50.000.000 | |
| 66 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase peningkatan lembaga/kelompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten | 100 % | Rp10.000.000 | |
| 67 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup | 8,8 % | Rp10.000.000 | |
| 68 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 1 Entitas | Rp10.000.000 | |
| 69 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan | 100 % | Rp10.000.000 | |
| 70 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti | 100 % | Rp10.000.000 | |
| 71 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | 5 Pengaduan | Rp10.000.000 | |
| 72 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase penanganan sampah<br>Persentase Pengurangan sampah | 15,81 %<br>13,59 % | Rp1.455.000.000 | |
| 73 | Pengelolaan Sampah | Jumlah pelayanan pengelolaan sampah | 49956 Ton | Rp1.455.000.000 | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | |
| | | | | | |
| 74 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 2 Unit | Rp580.000.000 | aspirasi desa : 2unit roda 3 dan tempat sampah beroda POKIR 2 unit roda 3 |
| 75 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | 32 Unit | Rp300.000.000 | |
| 76 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | 26873 Ton | Rp550.000.000 | |
| 77 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | Jumlah sampah yang terdaur ulang | 23082 Ton | Rp25.000.000 | |
| 78 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | Persentase luas layanan pengumpulan sampah | 0% | Rp0 | |
| 79 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 0 Ton | Rp0 | |
| 80 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 0 Ton | Rp0 | |
| | | | | **Rp19.956.955.150** | |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 merupakan pelaksanaan lanjutan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan rencana kerja dan catatan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat paparan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup dalam periode satu tahun, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara langsung maupun yang dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.

Probolinggo, 29 Juli 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**AGUS BUDIANTO, ST., M. Si**
Pembina Tk. I
NIP. 19721209 200312 1 004

# RENCANA KERJA
# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
# KABUPATEN PROBOLINGGO
# TAHUN 2026

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
## KABUPATEN PROBOLINGGO

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo ini disusun berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029. Dokumen Renja ini merupakan dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2026 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, sebagai upaya untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Probolinggo, 18 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PROBOLINGGO

**MUNARIS, S.Sos., M.A.P.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730709 199301 1002

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**

**DAFTAR ISI** ..... **ii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Landasan Hukum ..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 3

1.4 Sistematika Penulisan ..... 4

**BAB II** ..... **6**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU** ..... **6**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 15

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 31

**BAB III** ..... **32**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH** ..... **32**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... 32

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... 33

3.3 Program dan Kegiatan ..... 35

**BAB IV** ..... **57**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** ..... **57**

**BAB V PENUTUP** ..... **67**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo di bidang administrasi kependudukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Reviu Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025. Penyusunan Renja 2026 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2026;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
25. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo;
26. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo 2026 untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Probolinggo Tahun

2025-2029.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, yaitu:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di administrasi kependudukan;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tahun lalu, perkiraan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (2025), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan mayarakat.

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, serta program dan kegiatan.

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

**BAB V. PENUTUP**

Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berikut hasil capaian indicator kinerja kunci lima tahun ke belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

| NO | INDIKATOR KINERJA KUNCI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase perekaman dan pencetakan KTP | 99.8% | 99,9% | 99% | 99.6% | 99.4% |
| 2 | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | - | - | 29% | 35% | 37,5% |
| 3 | Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran | 84,33% | 87,51% | 89,8% | 92,5% | 89% |
| 4 | Persentase lembaga yang kerjasama melalui PKS hak akses | - | - | 60% | - | 44% |

Selain itu program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Adapun kendala–kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 antara lain:

1. Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menyebabkan adanya pengurangan belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas sebesar 50%, dan membatasi kegiatan studi banding, pencetakan, serta *focus group discussion*.
2. Fasilitas dan infrastruktur perekaman yang ada di Kecamatan banyak yang sudah tidak layak pakai atau rusak, sehingga menghambat proses perekaman KTP-el, perbaikan atau penggantian peralatan yang rusak membutuhkan biaya yang besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Penyusunan kembali rencana realisasi program kegiatan agar tetap dapat terlaksana.
2. Adanya anggaran khusus untuk pengadaan peralatan perekaman KTP-el pada Tahun 2025 untuk mengganti alat perekaman yang rusak di Kecamatan.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil capaian kinerja program kegiatan tahun 2024, kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Probolinggo

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| **2.12** | | | **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil** | | | | | | | | | |
| **2.12.01** | | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | |
| **2.12.01.01** | | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | |
| **2.12.01.01** | **01** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah** | **5%** | **1,3%** | **1%** | **2%** | **200%** | **75** | **N/A** | **N/A** |
| 2.06.01.00 | **01** | **01** | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | - | - | - |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | | | | | Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun | | | | | | | | |
| 2.06.01.01 | 01 | 02 | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Derah | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 47% | 52% |
| 2.06.01.01 | 01 | 05 | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksana | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 78% | 87% |
| 2.06.01.01 | 01 | 06 | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 90% | 75% | 90% | 90% | 100% | 90% | 76% | 84% |
| 2.06.01.01 | 01 | 07 | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan | 90% | 87% | 90% | 90% | 100% | 90% | - | - |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.06.01.01 | 01 | 08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 90% | 90% | 90% | 82,5% | 91,6% | 90% | 43% | 48% |
| 2.06.01.01 | 01 | 09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | 90% | 90% | 90% | 80% | 88,8% | 90% | 79% | 88% |
| | | | | | | | | | | | | |
| **2.12.02** | | | **PROGRAM PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN** | **Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan** | **90%** | **70,0%** | **90%** | **90%** | **100%** | **90%** | **87%** | **97%** |
| 2.12.02 | 2 | 01 | Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persentase Dokumen penduduk yang diterbitkan | 90% | 67,5% | 90% | 90% | 100% | 90% | 100% | 111% |
| 2.12.02 | 2 | 02 | Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk | Persentase penyelenggaraan adminduk yang sesuai dengan SOP | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 0 | 0 |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.02 | 2 | 03 | Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Prosentase pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran Penduduk | 90% | 53% | 90% | 90% | 100% | - | - | - |
| 2.12.02 | 2 | 04 | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah pengaduan pendaftaran penduduk yang ditindaklanjuti | - | - | 90% | 90% | 100% | - | - | - |
| **2.12.03** | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI DOKUMEN PENCATATAN SIPIL** | **90%** | **73,6%** | **90%** | **87,8%** | **97,6%** | **90%** | **43%** | **48%** |
| 2.12.03 | 2 | 01 | Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | - | - |
| 2.12.03 | 2 | 02 | Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan | 90% | 56,3% | 90% | 90% | 100% | 90% | - | - |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan *(output)* | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.12.03 | 2 | 03 | Kegiatanan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Prosentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 90% | 75% | 90% | 83,5% | 96% | 90% | 44% | 49% |
| **2.12.04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **90%** | **74,5%** | **90%** | **87,5%** | **97%** | **90%** | **1,2%** | **1%** |
| 2.12.04 | 2 | 01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Persentase Data Kependudukan yang dikelola secara elektronik dan unit kerja yang memanfaatkan data kependudukan | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 7% | 8% |
| 2.12.04 | 2 | 02 | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan Sesuai SOP | - | - | 90% | 90% | 100% | - | - | - |
| 2.12.04 | 2 | 03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase perangkat SIAK yang dikelola dan inovasi yang dibuat | 90% | 88% | 90% | 82,5% | 92% | 90% | 0,7% | 1% |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya pembangunan kesejahteraan rakyat, di bidang yang didasarkan pada perumusan kebijakan kependudukan yang diarahkan untuk pengendalian kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, peningkatan kualitas pengelolaan administrasi dan informasi kependudukan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan kependudukan. Oleh karena itu Administrasi Kependudukan merupakan sub Sistem dari Sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada:

1. Pemenuhan hak asasi setiap orang dibidang pelayanan administrasi kependudukan yang profesional tanpa diskriminasi;
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran penduduk mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan serta kewajiban mereka untuk berpartisipasi dalam prosesnya;
3. Menghasilkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan lengkap untuk berbagai keperluan, termasuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan;
4. Memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam penerbitan dokumen kependudukan, perubahan data, serta informasi terkait kependudukan;
5. Memberikan perlindungan hukum bagi penduduk melalui pengakuan identitas dan status kependudukan yang sah;
6. Mendukung proses perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan, baik nasional, regional, maupun lokal, dengan data kependudukan yang valid;
7. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, termasuk pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi penduduk;
8. Mencegah terjadinya manipulasi data kependudukan dan memastikan kerahasiaan data penduduk.

Sistem Administrasi Kependudukan terdiri atas 3 (tiga) sub sistem yaitu sub sistem Pelayanan Pendaftaran Penduduk, sub sistem Pelayanan Pencatatan Sipil dan sub sistem Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Peranan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kaitannya dengan fungsi pemerintah antara lain:

1. Dasar Perencanaan Pembangunan:
    - Data kependudukan yang akurat dan terkini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
    - Dengan mengetahui jumlah penduduk, distribusi usia, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, misalnya dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta program-program sosial lainnya.
2. Pelayanan Publik yang Lebih Baik:
    - Data kependudukan yang akurat memudahkan pemerintah dalam memberikan berbagai jenis pelayanan publik, seperti pembuatan kartu identitas, akta kelahiran, akta perkawinan, dan lain-lain.
    - Pelayanan publik yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis:
    - Data kependudukan yang akurat digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam pemilihan umum (pemilu).
    - Hal ini memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat terdaftar dan menggunakan hak pilihnya dengan benar.
4. Pengakuan dan Perlindungan Hukum:
    - Dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, dan akta perkawinan memberikan pengakuan hukum atas identitas dan status individu.
    - Dokumen ini penting untuk berbagai keperluan administratif, seperti pembukaan rekening bank, pendaftaran sekolah, dan urusan hukum lainnya.
5. Dasar Pengambilan Kebijakan:
    - Data kependudukan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.
    - Misalnya, data kependudukan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran, berdasarkan informasi tentang distribusi penyakit dan kelompok rentan.
6. Tertib Administrasi dan Keamanan:
    - Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang baik menciptakan tertib administrasi kependudukan.
    - Hal ini membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta mencegah terjadinya tindakan kriminal.
7. Kerjasama Antar Lembaga:
    - Data kependudukan yang valid dan terpercaya menjadi dasar bagi kerjasama antar lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah.
    - Misalnya, kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan

lembaga kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional.

Pencapaian Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Indikator Persentase Perekaman KTP-el telah mencapai target di tahun 2024 dan di Semester I tahun 2025 sudah hapir mencapai target. Langkah-langkah perencanaan yang akan diambil untuk tetap mepertahankan dan meningkatkan capaian tersebut di tahun 2026 yaitu dengan meningkatkan kegiatan jemput bola layanan perekaman KTP-el dan terus mengembangkan inovasi Godigital untuk pelayanan berbasis online.

Indikator persentase kepemilikan KIA bagi anak umur nol (0) sampai 17 tahun kurang satu hari masih belum memenuhi target di tahun 2024 dan Semester I 2025 dikarenakan kurangnya jumlah SDM pelayanan untuk program jemput bola ke Sekolah Dasar (SD). Begitupun dengan indikator Persentase kepemilikan akta kelahiran juga masih belum memenuhi target karena Kurangnya kesadaran Masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan. Indikator persentase aktivasi IKD masih jauh dari target karena masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan IKD sebagai pengganti KTP- el, rendahnya literasi digital masyarakat, dan ada kekhawatiran dari masyarakat mengenai keamanan data.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dan proyeksi tahun 2025 kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Probolinggo

| NO | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2024 (n-2) | Tahun 2025 (n-1) | Tahun 2026 (n) | Tahun 2027 (n+1) | Tahun 2024 (n-2) | Tahun 2025 (Semester I) (n-1) | Tahun 2026 (n) | Tahun 2027 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 90,2 | 92,3 | 92,4 | 92,6 | 92,19 | - | 92,4 | 92,6 | |
| 2 | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | | Perekaman KTP El | 99,4% | 99,4% | 99,4% | 99,4% | 99,3% | 98,47% | 99,4% | 99,4% | |
| 3 | | | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 50% | 50% | 50% | 50% | 37,5% | 39,22% | 52% | 54% | |
| 4 | | | Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran | 98% | 97% | 97,5% | 97,6% | 89% | 90,32% | 95,4% | 96% | |
| 5 | | | Persentase lembaga yang kerjasama melalui PKS hak akses | - | 44% | 56% | 67% | 44% | 56% | 56% | 67% | |
| 6 | | Aktivasi IKD | | 25% | 30% | 30% | 30% | 2,4% | 2,52% | 26% | 27% | |

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tujuan yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terdapat Isu Strategis Transformasi Sosial terkait Perlindungan Sosial yang Adaptif dalam RPJMN 2025-2029. Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Berikut isu strategis terkait perlindungan sosial yang adaptif:

1. Akurasi program bantuan sosial masih rendah;
2. Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim;
3. Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan;
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah;
5. Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan;
6. Program Jaminan Sosial belum optimal dan inklusif;

Seiring dengan tujuan transformasi pelayanan berbasis teknologi isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah:

1. Diperlukan pemutakhiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi seluruh penduduk Kabupaten Probolinggo untuk memastikan data kependudukan valid dan akurat;
2. Digitalisasi layanan kependudukan terkendala oleh keterbatasan sarana-prasarana dan rendahnya literasi digital masyarakat;
3. Tingkat keamanan data kependudukan belum optimal sehingga rentan terhadap penyalahgunaan dan kebocoran.

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikian dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Masih dihadapkan pada anggapan masyarakat bahwa pengurusan dokumen kependudukan tergolong sulit.
3. Ada Masyarakat yang memiliki persepsi bahwa pelayanan administrasi kependudukan dikenakan biaya, meskipun sejatinya layanan tersebut disediakan secara gratis.
4. Kurangnya kepercayaan Masyarakat akan pemanfaatan data Identitas Kependudukan berbasis Digital (IKD) karena adanya potensi tindak kejahatan dengan menyalahgunakan data kependudukan.
5. Masyarakat kesulitan untuk datang ke Kantor Disdukcapil terutama bagi penduduk yang rentan, disabilitas dan lansia, karena minimnya waktu, sarpras dan biaya karena jarak yang jauh, mengingat Wilayah Geografis yang Luas dengan 24 Kecamatan, 330 Desa/ Kelurahan.

Sedangkan peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain:

1. Penerapan teknologi digital dalam proses pelayanan administrasi kependudukan secara nasional hingga daerah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan.
2. Adanya terobosan pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis online berikut dengan pengiriman berkas melalui kurir ekspedisi.
3. Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama.

Dari isu-isu tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Sistem Administrasi Berbasis Teknologi Informasi.
2. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara online dan pengiriman dokumen melalui kurir ekspedisi.
3. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Cetak di Tempat atau pelayanan keliling (Jemput Bola).
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepada petugas tentang IT dan keterampilan serta kemampuan melaksanakan pelayanan prima dan profesional;
5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai sesuai skala prioritas kebutuhan;
6. Membangun jaringan sistem informasi kependudukan berbasis SIAK terhadap pusat, provinsi, kecamatan, desa/kelurahan serta instansi terkait.
7. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan dan juga sosialisasi mengenai layanan berbasis tekhnologi.
8. Melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program secara periodik dan intensif.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan rencana kinerja sebelumnya, telah dianalisis kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perangkat daerah yang telah ditentukan. Tetapi dalam perjalanan waktu masih terdapat adanya refocusing anggaran terkait efisiensi untuk pelaksanaan program penurunan angka kemiskinan ekstrem. Sehingga beberapa pos anggaran dilakukan perhitungan ulang pada kegiatan yang mendukung efesiensi anggaran untuk mendukung prioritas kegiatan. Sehingga kegiatan lain hanya dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang diperoleh.

Program pengelolaan profil kependudukan ada di RKPD namun tidak dianggarkan pada hasil analisis kebutuhan. karena batasan pagu dan program prioritas pembangunan pemerintah daerah. Untuk mengetahui indikator kinerja dan kelompok sasaran dari masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel T-C.31.berikut:

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Probolinggo

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Dukcapil** | **Nilai LHE SAKIP Perangkat Daerah** | **78,76** | **5.352.345.024,66** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Dukcapil** | **Nilai LHE SAKIP Perangkat Daerah** | **75,7** | **5.352.345.024,66** | Anggaran di efisiensi karena batasan pagu dan program prioritas pembangunan pemerintah daerah |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dukcapil** | **Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu** | **4 dok** | **6.272.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dukcapil** | **Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu** | **4 dok** | **6.272.000** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dukcapil | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dok | 5.024.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dukcapil | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dok | 5.024.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | - | - | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | - | - | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | - | 0 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dukcapil | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dukcapil | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 0 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dukcapil | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 lap | 1.248.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dukcapil | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 lap | 1.248.000,00 | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Dukcapil** | **Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu** | **12 dok** | **3.688.541.040,66** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Dukcapil** | **Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu** | **12 dok** | **3.688.541.040,66** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dukcapil | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 orang | 3.688.541.040,66 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dukcapil | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 orang | 3.688.541.040,66 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dok | - | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - | - | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - | - | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dukcapil | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | 2 lap | - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dukcapil | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | - | - | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Dukcapil | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Dukcapil | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | - | 0 | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Dukcapil** | **Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu** | **8 dok** | **-** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Dukcapil** | **Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu** | - | **0** | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dukcapil | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 dok | - | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dukcapil | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - | 0 | |
| | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | - | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | - | 0 | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dukcapil | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | - | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dukcapil | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | 0 | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Dukcapil** | **Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu** | **12 dok** | **3.648.000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Dukcapil** | **Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu** | **2 dok** | **3.648.000** | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - | 0 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - | 0 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dukcapil | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan | - | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dukcapil | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | 0 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Pelatihan | | | | | | | | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Dukcapil | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 orang | 3.648.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Dukcapil | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 orang | 3.648.000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Dukcapil** | **Persentase pemenuhan administrasi umum PD** | **100%** | **451.466.100** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Dukcapil** | **Persentase pemenuhan administrasi umum PD** | **100%** | **451.466.100** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dukcapil | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 3.417.900 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dukcapil | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 3.417.900 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dukcapil | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 139.236.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dukcapil | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 paket | 139.236.000 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dukcapil | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | 1.812.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dukcapil | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | 1.812.000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dukcapil | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 paket | 23.283.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dukcapil | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 paket | 23.283.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dukcapil | Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 paket | 148.811.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dukcapil | Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4 paket | 148.811.000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 1.689.200 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 1.689.200 | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Dukcapil | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 paket | 98.460.000 | Penyediaan Bahan/Material | Dukcapil | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 paket | 98.460.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dukcapil | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | - | - | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dukcapil | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | - | 0 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dukcapil | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 34.757.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dukcapil | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 34.757.000 | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - | - | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - | - | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dukcapil | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | 0 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Dukcapil** | **Persentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD** | **100%** | **37.510.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Dukcapil** | **Persentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD** | **100%** | **37.510.000** | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dukcapil | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | - | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dukcapil | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | 0 | |
| | Pengadaan Alat Besar | Dukcapil | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | - | - | Pengadaan Alat Besar | Dukcapil | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | - | 0 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dukcapil | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 37.510.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dukcapil | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 37.510.000 | |
| | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Dukcapil | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | - | - | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Dukcapil | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | - | 0 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dukcapil | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dukcapil | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | 0 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Dukcapil** | **Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD** | **12 Laporan** | **1.118.407.884** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Dukcapil** | **Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD** | **12 Laporan** | **1.118.407.884** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dukcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 4.440.700 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dukcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 4.440.700 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dukcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 184.800.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dukcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 184.800.000 | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dukcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | - | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dukcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | 0 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dukcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 929.167.184 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dukcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 929.167.184 | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Dukcapil** | **Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik** | **49 unit** | **46.500.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Dukcapil** | **Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik** | **49 Unit** | **46.500.000** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dukcapil | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | 31.500.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dukcapil | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 11 Unit | 31.500.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dukcapil | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 unit | 1.200.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | Dukcapil | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 1.200.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Lapangan | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar | Dukcapil | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | - | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar | Dukcapil | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | - | - | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dukcapil | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 13.800.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dukcapil | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 13.800.000 | |
| | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Dukcapil | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | - | - | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Dukcapil | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | - | - | |
| | Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dukcapil | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | - | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dukcapil | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | - | - | |
| | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Dukcapil** | **Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk** | **80%** | **36.208.600** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Dukcapil** | **Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk** | **80%** | **36.208.600** | |
| | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Dukcapil** | **Persentase perekaman dan pencetakan KTP** | **99,4%** | **28.500.000** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Dukcapil** | **Persentase perekaman dan pencetakan KTP** | **99,4%** | **28.500.000** | |
| | | | **Persentase aktivasi IKD** | **30%** | | | | **Persentase aktivasi IKD** | **26%** | | |
| | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 150 | 9.300.000 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 150 | 9.300.000 | |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 180.000 Dokumen | 19.200.000 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 180.000 Dokumen | 19.200.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | - | 0 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | - | 0 | |
| | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | 0 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | 0 | |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | - | 0 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | - | 0 | |
| | Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Dukcapil | Jumlah laporan pencatatan peristiwa kependudukan yang dilaksanakan | - | 0 | Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Dukcapil | Jumlah laporan pencatatan peristiwa kependudukan yang dilaksanakan | - | 0 | |
| | Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan | - | 0 | Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan | - | 0 | |
| | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk | Dukcapil | Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk | - | 0 | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk | Dukcapil | Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk | - | 0 | |
| | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **Dukcapil** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk** | **100%** | **1.708.600** | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **Dukcapil** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk** | **100%** | **1.708.600** | |
| | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | - | 0 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | - | 0 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 5 dok | 1.708.600 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 22 Dokumen | 1.708.600 | |
| | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Dukcapil** | **Persentase kepemilikan KIA** | **50%** | **6.000.000** | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Dukcapil** | **Persentase kepemilikan KIA** | **52%** | **6.000.000** | |
| | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2 Laporan | 2.400.000 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2 Laporan | 2.400.000 | |
| | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | - | 0 | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | - | 0 | |
| | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | - | 0 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | - | 0 | |
| | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan | - | 0 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan | - | 0 | |
| | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | - | 0 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | - | 0 | |
| | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan | 3 dokumen | 3.600.000 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi | 3 Dokumen | 3.600.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penduduk | | dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk | | | Penduduk | | Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk | | | |
| | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk | - | 0 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk | - | 0 | |
| | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia | - | 0 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia | - | 0 | |
| | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Dukcapil** | **Persentase penindaklanjutan pengaduan terkait pendaftaran penduduk** | **-** | **0** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Dukcapil** | **Persentase penindaklanjutan pengaduan terkait pendaftaran penduduk** | **-** | **0** | |
| | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | 0 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | 0 | |
| | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk | - | 0 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk | - | 0 | |
| | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | - | 0 | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | - | 0 | |
| | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Dukcapil** | **Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil** | **98%** | **504.335.600** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Dukcapil** | **Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil** | **98%** | **504.335.600** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Dukcapil** | **Persentase Akta kelahiran** | **97%** | **1.335.600** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Dukcapil** | **Persentase Akta kelahiran** | **95,4%** | **1.335.600** | |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | - | - | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | - | - | |
| | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 4 paket | 13.500.000 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 12 Paket | 1.335.600 | |
| | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Dukcapil** | **Persentase Akta kematian** | **100%** | **3.000.000** | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Dukcapil** | **Persentase Akta kematian** | **100%** | **3.000.000** | |
| | | | **Persentase Akta Perkawinan Non Muslim** | **100%** | | | | **Persentase Akta Perkawinan Non Muslim** | **100%** | | |
| | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | - | - | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | - | - | |
| | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | - | - | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | - | - | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | 12 Laporan | 3.000.000 | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | 15 Laporan | 3.000.000 | |
| | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Dukcapil** | **Persentase penindaklanjutan pengaduan terkait pencatatan sipil** | **100%** | **500.000.000** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Dukcapil** | **Persentase penindaklanjutan pengaduan terkait pencatatan sipil** | **100%** | **500.000.000** | |
| | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 57 Laporan | 500.000.000 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 57 Laporan | 500.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Dukcapil** | **Persentase lembaga yang memanfaatkan data administrasi kependudukan berdasar PKS** | **100%** | **59.619.000** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Dukcapil** | **Persentase lembaga yang memanfaatkan data administrasi kependudukan berdasar PKS** | **100%** | **59.619.000** | |
| | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **Dukcapil** | **Persentase lembaga yang kerjasama melalui PKS hak akses** | **56%** | **2.000.000** | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **Dukcapil** | **Persentase lembaga yang kerjasama melalui PKS hak akses** | **56%** | **2.000.000** | |
| | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | - | 0 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | | | |
| | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 10 Dokumen | 2.000.000 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 10 Dokumen | 2.000.000 | |
| | **Penataan Administrasi Kependudukan** | **Dukcapil** | **Persentase penyusunan dokumen kebijakan pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar** | **100%** | **0** | **Penataan Administrasi Kependudukan** | **Dukcapil** | **Persentase penyusunan dokumen kebijakan pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar** | **100%** | 0 | |
| | Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. | Dukcapil | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, | - | 0 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. | Dukcapil | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian. dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | | | Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian. dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | | | |
| | **Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan** | **Dukcapil** | **Persentase penyajian data kependudukan** | **100%** | **57.619.000** | **Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan** | **Dukcapil** | **Persentase penyajian data kependudukan** | **100%** | **57.619.000** | |
| | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 5 Laporan | 57.619.000 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 5 Laporan | 57.619.000 | |
| | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | 0 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | |
| | Komunikasi. Informasi. dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi. Informasi. dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | - | 0 | Komunikasi. Informasi. dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Dukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi. Informasi. dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | - | 0 | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **Dukcapil** | **Persentase data yang dimutakhirkan dalam profil kependudukan** | **15%** | **16.000.000** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **Dukcapil** | **Persentase data yang dimutakhirkan dalam profil kependudukan** | **-** | **0** | |
| | **Penyusunan Profil Kependudukan** | Dukcapil | Persentase komponen data kependudukan yang tersajikan | 15% | 16.000.000 | **Penyusunan Profil Kependudukan** | Dukcapil | Persentase komponen data kependudukan yang tersajikan | - | **0** | |
| | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Dukcapil | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | | | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Dukcapil | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | - | 0 | |
| | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Dukcapil | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 1 Dokumen | 16.000.000 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Dukcapil | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | - | 0 | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam rencana kerja perubahan tahunan ini adalah berasal dari seluruh bidang dan sekretariat yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.

Setiap bidang dan sekretariat merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dan menyusun program kegiatan dan sub kegiatan yang sudah disesuaikan dengan Kepmendagri 050 pemutahiran berikut dengan jumlah pendanaan yang dibutuhkan secara rinci. Kemudian usulan tersebut diolah di Sub Bagian Perencanaan yang kemudian disesuai dengan indikator dimasing-masing Program kegiatan dan sub kegiatan dan tentu berpedoman dengan pagu yang telah ditetapkan.

Usulan program kegiatan dan sub kegiatan dapat pula berasal hasil Musrembang yang sebelumnya telah dilaksanakan yang berpedoman kepada kegiatan yang bersifat prioritas. Dari Program dan Kegiatan yang diusulkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kamus usulan sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Dukcapil** | **Nilai LHE SAKIP Perangkat Daerah** | **75.7** | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Dukcapil** | **Persentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD** | **100%** | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dukcapil | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | |
| | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Dukcapil** | **Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk** | **80%** | |
| | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Dukcapil** | **Persentase kepemilikan KIA** | **52%** | |
| | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | 330 Paket | |
| | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Dukcapil** | **Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil** | **98%** | |
| | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Dukcapil** | **Persentase penindaklanjutan pengaduan terkait pencatatan sipil** | **100%** | |
| | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 1 Paket | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya pembangunan kesejahteraan rakyat, pemerintah Indonesia menempuh strategi lintas bidang yang didasarkan pada perumusan kebijakan kependudukan yang diarahkan untuk pengendalian kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi dan data kependudukan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan pelayanan dasar. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.4.4-880 Dukcapil Tahun 2025 tentang petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Perjanjian Kinerja dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dalam Perjanjian tersebut terdapat target inerja diantaranya yaitu Persentase Perekaman KTP-el, Persentase Kepemilikan KIA, Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Aktivasi IKD, Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 terdapat arah kebijakan bidang urusan pemerintahan provinsi dan Kabupaten/Kota pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki arah kebijakan Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital. Arah kebijakan tersebut mendukung Asta Cita Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dapat mendukung Prioritas Nasional 4 pada Kegiatan Prioritas Utama yaitu Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah dengan cara menyediakan data status Pendidikan anak usia sekolah. Namun hal ini terkendala data yang kurang akurat dikarenakan data status

Pendidikan pada Kartu Keluarga (KK) yang tidak di perbarui oleh masyarakat jika ada perubahan status Pendidikan anak. Kegiatan Prioritas Utama yang dapat didukung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berikutnya yaitu Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi. Dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo telah merancang inovasi layanan berbasisi teknologi. Namun inovasi tersebut masih terkendala sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Kebijakan Operasional yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah:

1. Mengadakan/menyelenggarakan pelayanan secara online melalui internet pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
2. Mengadakan/menyelenggarakan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil hingga desa,
3. Mengadakan pelayanan jemput bola dan pencetakan dokumen langsung jadi di Desa, Sekolahan, Pondok – Pondok Pesantren, Perusahaan/ Instansi Pemerintah, Swasta maupun di Kecamatan-Kecamatan se Kabupaten Probolinggo,
4. Meningkatkan hubungan dengan mitra baik dengan Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat,
5. Memberikan kemudahan baik administrasi maupun prosedur,
6. Meningkatkan kualitas pelayanan baik menyangkut personil maupun sarana / prasarana.

## 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Tujuan pada dokumen Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo periode 2025-2029 mengacu kepada Sasaran RPD Kabupaten Probolinggo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas pokok dan fungsinya bersama dengan OPD terkait mengemban amanah pada misi Bupati kesatu Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif melaksanakan Sasaran "Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif" yang merupakan penjabaran dari Tujuan "Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional".

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yaitu **"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif Melalui layanan Administrasi Kependudukan"** dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan

Masyarakat. Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu di ditetapkan pula pernyataan sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan, Oleh karena itu sasaran lebih fokus pada penyusunan program yang bersifat spesifik terinci, dapat diukur dan dicapai. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi kependudukan**

   **Indikator 1** Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan satuan Indeks.

   Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian survei kepuasan masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh masyarakat. IKM dihitung dengan menggunakan **nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan** sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2004.

   **Indikator 2** Persentase Penyediaan Data Kependudukan dengan satuan Persen (%)

   Definisi Operasional dari indikator tersebut adalah Pengajuan permohonan penyediaan data kependudukan yang terfasilitasi. Hasil persentase tersebut diperoleh dari rumus Jumlah penyediaan data kependudukan yang terfasilitas dibanding jumlah seluruh permohonan fasilitasi penyediaan data kependudukan. Jumlah permohonan dengan lengkap dan tepat termasuk pada seluruh permohonan fasilitasi.

   **Indikator 3** Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan satuan Persen (%)

   Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan terdiri dari Kepemilikan KTP-el, Kepemilikan KIA, Kepemilikan Akta Lahir dan aktivasi IKD. Persentase tersebut diperoleh dari Jumlah masyarakat yang memiliki dokumen dibagi Jumlah masyarakat yang wajib memiliki dokumen dikali 100%.

2. **Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Perangkat Daerah**

   **Indikator** Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%)

   Persentase Kenaikan Nilai LHE AKIP adalah besaran kenaikan yang diharapkan dari capaian tahun sebelumnya. Persentase tersebut diperoleh dari selisih antara nilai tahun berjalan dan nilai tahun sebelumnya, yang dibagi dengan nilai tahun sebelumnya dan dikalikan 100%

## 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan. Rumusan Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempertimbangkan antara lain:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
b. Pengentasan kemiskinan

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025, yaitu:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**2. Program Pendaftaran Penduduk**

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan. Sub kegiatan ini nantinya memiliki aktivitas menyediakan data pekerja imigran dan jemput bola penduduk rentan termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.
   - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk memiliki aktivitas Jemput bola Perekaman KTP dan Aktivasi IKD.

b. Penataan Pendaftaran Penduduk
   - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan memiliki aktivitas cetak formulir dengan tagging pengentasan kemiskinan ektrim.

c. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
   - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk memiliki aktivitas koordinasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah terkait pencegahan perkawinan anak.
   - Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait Pendaftaran Penduduk, dengan aktivitas jemput bola Kartu Identitas Anak ke Sekolah Dasar.

**3. Program Pencatatan Sipil**

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

a. Pelayanan Pencatatan Sipil
   - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan, dengan aktivitas cetak formulir administrasi kependudukan dengan tujuan mengurangi pengeluaran biaya oleh masyarakat.

b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
   - Koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai sub giat pendukung Asta Cita.
   - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil, dengan aktivitas monitoring dan evaluasi Buku Pokok Pemakaman Online dan Jemput Bola Catatan Kawin Si Inem.

c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
   - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil, dengan aktivitas sosialisasi kepada masyarakat dan jemput bola layanan adminduk.

**4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
   - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan aktivitas koordinasi Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan data kependudukan.

b. Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan
   - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan aktivitas pemeliharaan jaringan dan tower.

Masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel T-C.33 berikut:

Tabel T-C,33,

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2027

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil** | | | | | | Anggaran di efisiensi karena batasan pagu dan program prioritas pembangunan pemerintah daerah | | |
| | | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | |
| 2.12 | | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | **5.952.508.224.66** | **SILPA. DAU** | | | **6.036.900.000** |
| 2.12-01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Nilai LHE SAKIP Perangkat Daerah** | **Dukcapil** | **75.7** | **5.352.345.024.66** | **SILPA. DAU** | | **76.23** | **5.411.900.000** |
| 2.12.01.2. | 01 | | **Perencanaan.Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen Perencanaan. penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu** | **Dukcapil** | **4 dok** | **6.272.000.00** | **SILPA. DAU** | | **4 dok** | 5.000.000 |
| 2.12.01.2. | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dukcapil | 4 dok | 5.024.000.00 | SILPA | | 2 dok | 1.000.000 |
| 2.12.01.2. | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dukcapil | - | - | - | | - | - |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.01.2. | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.01.2. | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | 2 | 2.000.000 |
| 2.12.01.2. | 01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.01.2. | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | 4 | 2.000.000 |
| 2.12.01.2. | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dukcapil | 2 lap | 1.248.000.00 | SILPA | | 2 | - |
| 2.12.01.2. | 02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu** | **Dukcapil** | **12 dok** | **3.688.541.040.66** | **DAU** | | **12 Dokumen** | **3.726.000.000** |
| 2.12.01.2. | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dukcapil | 24 Orang/ bulan | 3.688.541.040.66 | DAU | | 25 Orang/ Bulan | 3.725.000.000 |
| 2.12.01.2. | 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.01.2. | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.01.2. | 02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.01.2. | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | 2 Laporan | 1.000.000 |
| 2.12.01.2. | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.01.2. | 03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Terkelola** | **Dukcapil** | **-** | **0** | | | **-** | **0** |
| 2.12.01.2. | 03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | - | 0 |
| 2.12.01.2. | 03 | 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | - | 0 |
| 2.12.01.2. | 03 | 04 | Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | - | 0 |
| 2.12.01.2. | 03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | - | 0 |
| 2.12.01.2. | 05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu** | **Dukcapil** | **12 dok** | **3.648.000** | **SILPA** | | **12 dok** | **4.000.000** |
| 2.12.01.2. | | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dukcapil | - | 0 | | | - | 0 |
| 2.12.01.2. | | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Dukcapil | - | 0 | | | - | 0 |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.01.2. | | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Dukcapil | 60 Orang | 3.648.000 | SILPA | | 60 Orang | 4.000.000 |
| 2.12.01.2. | 06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase pemenuhan administrasi umum PD** | **Dukcapil** | **100%** | **451.466.100** | **SILPA** | | **100%** | **465.900.000** |
| 2.12.01.2. | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Dukcapil | 3 Paket | 3.417.900 | SILPA | | 2 Paket | 3.500.000 |
| 2.12.01.2. | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dukcapil | 3 paket | 139.236.000 | SILPA. DAU | | 4 paket | 150.000.000 |
| 2.12.01.2. | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Dukcapil | 1 paket | 1.812.000 | SILPA | | 1 paket | 1.812.000 |
| 2.12.01.2. | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Dukcapil | 12 paket | 23.283.000 | SILPA | | 1 paket | 23.288.000 |
| 2.12.01.2. | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dukcapil | 4 paket | 148.811.000 | SILPA. DAU | | 2 paket | 150.000.000 |
| 2.12.01.2. | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dukcapil | 12 Dokumen | 1.689.200 | SILPA | | 12 Dokumen | 1.700.000 |
| 2.12.01.2. | 06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Dukcapil | 12 paket | 98.460.000 | SILPA | | 12 Paket | 100.600.000 |
| 2.12.01.2. | 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.01.2. | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dukcapil | 12 Laporan | 34.757.000 | SILPA | | 12 Laporan | 35.000.000 |
| 2.12.01.2. | 06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.01.2. | 06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.01.2. | 07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD** | **Dukcapil** | **100%** | **37.510.000** | **DAU** | | **100%** | **38.000.000** |
| 2.12.01.2. | 07 | 04 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.01.2. | 07 | 05 | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.01.2. | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Dukcapil | 1 Unit | 37.510.000 | DAU | | 1 Unit | 38.000.000 |
| 2.12.01.2. | 07 | 08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.01.2. | 07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.01.2. | 08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD** | Dukcapil | **12 Laporan** | **1.118.407.884** | **SILPA. DBH** | | **12 Laporan** | **1.141.900.000** |
| 2.12.01.2. | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dukcapil | 12 Laporan | 4.440.700 | SILPA | | 12 laporan | 4.500.000 |
| 2.12.01.2. | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Dukcapil | 12 Laporan | 184.800.000 | SILPA | | 12 laporan | 185.000.000.00 |
| 2.12.01.2. | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dukcapil | - | 0 | | | | |
| 2.12.01.2. | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Dukcapil | 12 Laporan | 929.167.184 | SILPA. DBH | | 12 laporan | 930.000.000 |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.01.2. | 09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik** | Dukcapil | **49 Unit** | **46.500.000** | **SILPA** | | **44 Unit** | **53.500.000** |
| 2.12.01.2. | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Dukcapil | 11 Unit | 31.500.000 | SILPA | | 11 Unit | 31.500.000 |
| 2.12.01.2. | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dukcapil | 1 Unit | 1.200.000 | SILPA | | 1 Unit | 2.000.000 |
| 2.12.01.2. | 09 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.01.2. | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Dukcapil | 20 Unit | 13.800.000 | SILPA | | 25 Unit | 20.000.000 |
| 2.12.01.2. | 09 | 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Dukcapil | - | 0 | | | | |
| 2.12.01.2. | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.12-02 | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk** | Dukcapil | **80%** | **36.208.600** | **SILPA. DAU** | | **80** | **36.700.000** |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.02.2. | 01 | | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase perekaman dan pencetakan KTP** | Dukcapil | **99.4%** | **28.500.000** | **SILPA. DAU** | | 99.4% | 60.000.000 |
| | | | | **Persentase aktivasi IKD** | | **26%** | | | | 30% | |
| 2.12.02.2. | 01 | 01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Dukcapil | 150 | 9.300.000 | SILPA. DAU | | 150 | 9.300.000 |
| 2.12.02.2. | 01 | 02 | Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | 180.000 Dokumen | 19.200.000 | DAU | | 180.000 Dokumen | 19.200.000 |
| 2.12.02.2. | 01 | 03 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.02.2. | 01 | 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.02.2. | 01 | 05 | Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.02.2. | 01 | 06 | Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah laporan pencatatan peristiwa kependudukan yang dilaksanakan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.02.2. | 01 | 07 | Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.02.2. | 01 | 08 | Pengumpulan. Analisis. dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk | Jumlah Dokumen Pengumpulan. Analisis. dan Diseminasi Data Terkait | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk | | | | | | | | |
| 2.12.02.2. | 02 | | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk** | Dukcapil | **100%** | **1.708.600.00** | **SILPA** | | **100%** | **2.200.000** |
| 2.12.02.2. | 02 | 01 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian. dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian. dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.02.2. | 02 | 02 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | Dukcapil | 22 Dokumen | 1.708.600 | SILPA | | 5 dok | 2.200.000 |
| 2.12.02.2. | 03 | | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase kepemilikan KIA** | Dukcapil | **52%** | **6.000.000** | **SILPA** | | 54% | **6.000.000** |
| 2.12.02.2. | 03 | 01 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | 2 lap | 2.400.000 | SILPA | | 2 Laporan | 2.400.000 |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.02.2. | 03 | 02 | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | - | 0 | | | | |
| 2.12.02.2. | 03 | 03 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.02.2. | 03 | 04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.02.2. | 03 | 05 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.02.2. | 03 | 06 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | - | 3.600.000 | SILPA | | 3 dokumen | 3.600.000 |
| 2.12.02.2. | 03 | 07 | Komunikasi. Informasi. dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi. Informasi. dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.02.2. | 03 | 08 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.02.2. | 04 | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Jumlah pengaduan pendaftaran penduduk yang ditindaklanjuti** | Dukcapil | - | 0 | | | **100%** | **0** |
| 2.12.02.2. | 04 | 01 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan. Formulir. dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan. Formulir. dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | - | 0 | | | - | 0 |
| 2.12.02.2. | 04 | 02 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.02.2. | 04 | 03 | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.12-03 | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil** | Dukcapil | **98%** | **504.335.600** | **SILPA** | | **99%** | **510.000.000** |
| 2.12.03.2. | 01 | | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Persentase Akta kelahiran** | Dukcapil | **95,4%** | **1.335.600** | **SILPA** | | **96%** | **4.000.000** |
| 2.12.03.2. | 01 | 01 | Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Dukcapil | | | | | 10.600 dok | 2.000.000 |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.03.2. | 01 | 02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.03.2. | 01 | 03 | Pengumpulan. Analisis. dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan. Analisis. dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.03.2. | 01 | 04 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.03.2. | 01 | 05 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | Dukcapil | 12 Paket | 1.335.600 | SILPA | | 4 paket | 2.000.000 |
| 2.12.03.2. | 02 | | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Persentase Akta kematian** | Dukcapil | **100%** | **3.000.000** | **SILPA** | | **100%** | **6.000.000** |
| | | | | **Persentase Akta Perkawinan Non Muslim** | Dukcapil | **100%** | | | | **100%** | |
| 2.12.03.2. | 02 | 01 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah. Talak. Cerai. dan Rujuk bagi | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah. Talak. Cerai. dan Rujuk | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Penduduk yang Beragama Islam | bagi Penduduk yang Beragama Islam | | | | | | | |
| 2.12.03.2. | 02 | 02 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.03.2. | 02 | 03 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Dukcapil | - | 0 | | | 10 | 2.000.000 |
| 2.12.03.2. | 02 | 04 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | - | 0 | | | 10 | 2.000.000 |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.03.2. | 02 | 05 | Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.03.2. | 02 | 06 | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | Dukcapil | 15 Laporan | 3.000.000 | SILPA | | 10 lap | 2.000.000 |
| 2.12.03.2. | 02 | 07 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.03.2. | 02 | 08 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.03.2. | 02 | 09 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.03.2. | 02 | 10 | Komunikasi. Informasi. dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi. Informasi. dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.03.2. | 02 | 11 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.03.2. | 03 | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Persentase penindaklanjutan pengaduan terkait pencatatan sipil** | **Dukcapil** | **100%** | **500.000.000** | **DAU PENDIDIKAN** | | **100%** | **500.000.000** |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.03.2. | 03 | 01 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan. Formulir. dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan. Formulir. dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.03.2. | 03 | 02 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.03.2. | 03 | 03 | Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah. Talak. Cerai. dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah. Talak. Cerai. dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12.03.2. | 03 | 04 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | Dukcapil | 57 Laporan | 500.000.000 | DAU PENDIDIKAN | | 1 Laporan | 500.000.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.12-04 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Persentase lembaga yang memanfaatkan data administrasi kependudukan berdasar PKS** | Dukcapil | **100%** | **59.619.000** | **SILPA** | | **100%** | **60.300.000** |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.12-04.2. | 01 | | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **Persentase lembaga yang kerjasama melalui PKS hak akses** | Dukcapil | **56%** | **2.000.000.00** | **SILPA** | | **67%** | **2.200.000** |
| 2.12-04.2. | 01 | 01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | Dukcapil | - | 0 | | | 1 Dokumen | 200.000 |
| 2.12-04.2. | 01 | 02 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Dukcapil | 10 Dokumen | 2.000.000 | SILPA | | 15 Dokumen | 2.000.000 |
| 2.12-04.2. | 01 | 03 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Dukcapil | - | 0 | | | | |
| 2.12-04.2. | 02 | | **Penataan Administrasi Kependudukan** | **Jumlah pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan Sesuai SOP** | Dukcapil | **100%** | **0** | | | **100%** | **200.000** |
| 2.12-04.2. | 02 | 01 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian. dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian. dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | Dukcapil | | | | | 1 Dokumen | 200.000 |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12-04.2. | 03 | | **Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan** | **Persentase penyajian data kependudukan** | Dukcapil | **100%** | **57.619.000** | **SILPA** | | **100%** | **57.900.000** |
| 2.12-04.2. | 03 | 01 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12-04.2. | 03 | 02 | Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri | Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12-04.2. | 03 | 03 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dukcapil | 5 Laporan | 57.619.000 | SILPA | | 5 Laporan | 57.900.000 |
| 2.12-04.2. | 03 | 04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12-04.2. | 03 | 05 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12-04.2. | 03 | 06 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12-04.2. | 03 | 07 | Komunikasi. Informasi. dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi. Informasi. dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12-04.2. | 03 | 08 | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12-04.2. | 04 | | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Persentase penanganan pelanggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | Dukcapil | - | **0** | | | - | - |
| 2.12-04.2. | 04 | 01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| 2.12-04.2. | 04 | 02 | Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah. Talak. Cerai. dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah. Talak. Cerai. dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahu 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12-04.2. | 04 | 03 | Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Dukcapil | - | 0 | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.12.05 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **Persentase Data Kependuduk dan Catatan Sipil yang tersajikan dalam profil Kependudukan** | Dukcapil | - | **0** | | | **16%** | **18.000.000** |
| 2.12.05.2. | 01 | | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **Jumlah data kependudukan yang tersusun pada profil kependudukan** | Dukcapil | - | **0** | | | 16% | 18.000.000 |
| 2.12.05.2. | 01 | 01 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah data kependudukan yang disediakan | Dukcapil | - | 0 | | | 1 Dokumen | 2.000.000 |
| 2.12.05.2. | 01 | 02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Jumlah profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan yang disusun | Dukcapil | - | 0 | | | 1 Dokumen | 16.000.000 |

Pada Misi ke-1 Bupati Probolinggo yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi. kolaboratif dan inovatif atau SAE PEMERINTAHAN terdapat Sasaran Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif dengan Program Prioritas SAE LAYANAN dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ikut mendukung program tersebut karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbasuk ke dalam Bidang Urusan Pelayana Publik. Terdapat tiga program pendukung Prioritas tersebut yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Selain mendukung program SAE LAYANAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mendukung Program Prioritas SAE BEROBAT denga subprogram / Kerja Prioritas KTP Kabupaten Probolinggo Bisa Berobat di Seluruh Indonesia. Untuk Program ini didukung oleh Program Pendaftaran Penduduk sebagai layanan dengan output perekaman dan penerbitan KTP. Berikut Aktifitas masing-masing program dalam mendukung Program Prioritas tersebut:

**Tabel 3.1**

**Aktifitas Program Pendukung Program Prioritas**

| PROGRAM PENDUKUNG | PROGRAM PRIORITAS | AKTIVITAS | KEGIATAN PENDUKUNG |
|---|---|---|---|
| Program Pendaftaran Penduduk | PROGRAM SAE LAYANAN & SAE BEROBAT | Pelayanan Pendaftaran Penduduk berupa KTP. KIA. IKD. Penduduk Pindah. Penduduk Datang. dan KK | a. Jemput Bola Pelayanan Penduduk Rentan. Sekolah. Rumah Sakit. Kecamatan.<br>b. Inovasi Go-Digital (Layanan Pengurusan Adminduk Secara Online). POKAK (Pelayanan Online Kartu Keluarga. Akta Kelahiran Dan KIA) di RS dan Puskesmas. JEMPOL DISKO (Jemput Bola di Sekolah) |
| Program Pencatatan Sipil | PROGRAM SAE LAYANAN | Pelayanan pembuatan dokumen akta perkawinan non muslim. akta kelahiran dan akta kematian | a. Jemput Bola Pelayanan Pencatatan Perkawinan non Muslim di Kecamatan Sukapura.<br>b. Inovasi Go-Digital (Layanan Pengurusan Adminduk Secara Online). POKAK (Pelayanan Online Kartu Keluarga. Akta Kelahiran Dan KIA) di RS dan Puskesmas. CATATAN KAWIN SI INEM (Pencatatan Perkawinan Siji Dadi Enem). SIAKO (Sistem Informasi Akte Kelahiran Online) |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | PROGRAM SAE LAYANAN | Penyediaan hak akses data administrasi kependudukan bagi lembaga yang memiliki PKS | Menyediakan data apabila ada Permintaan Data dan Pemadanan Data yang dibutuhkan oleh OPD maupun Lembaga non Pemerintahan |

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan sinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah di Kabupaten yaitu pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi kependudukan pada indikator Persentase Penyediaan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data kependudukan yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan data tersebut. Dalam aktivitasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo juga mengadakan Perjanjian Kerjasama Hak Akses dan

Pemanfaatan Data dengan Perangkat Daerah yang membutuhkan Hak Akses tersebut.

Selain dengan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Probolinggo juga berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dalam mewujudkan sasaran Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan khususnya Kepemilikan KTP-el dalam rangka memenuhi kebutuhan blanko KTP-el. Untuk mengatasi keterbatasan persediaan Blanko KTP-el karena jumlah blanko KTP-el dari pusat yang terbatas maka apabila persediaan blanko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tidak dapat mencukupi permintaan pencetakan KTP-el maka untul memperlancara pelayanan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminjam persediaan Blanko KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja. pencapaian Renstra. dan tujuan dan sasaran Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam RPD. Program kerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPD Kabupaten Probolinggo yang harus diselaraskan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

| Kode | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Pagu Indikatif APBD | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.12 | | | **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil** | | | |
| 2.12 | | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | |
| 2.12 | | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | **5.952.508.224.66** | |
| 2.12.01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **75,7** | **5.352.345.024.66** | |
| 2.12.01.2. | 01 | | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **6.272.000.00** | |
| 2.12.01.2. | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 | 5.024.000.00 | |
| 2.12.01.2. | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 | 1.248.000.00 | |
| 2.12.01.2. | 02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **3.688.541.040.66** | |
| 2.12.01.2. | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 23 | 3.688.541.040.66 | |
| 2.12.01.2. | 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 0 | |

| Kode | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Pagu Indikatif APBD | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.12.01.2. | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 03 | 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **3.648.000** | |
| 2.12.01.2. | 05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 | 3.648.000 | |
| 2.12.01.2. | 06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **451.466.100** | |
| 2.12.01.2. | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3 | 3.417.900 | |
| 2.12.01.2. | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 | 139.236.000 | |
| 2.12.01.2. | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1 | 1.812.000 | |
| 2.12.01.2. | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 | 23.283.000 | |
| 2.12.01.2. | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4 | 148.811.000 | |
| 2.12.01.2. | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 | 1.689.200 | |
| 2.12.01.2. | 06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | 12 | 98.460.000 | |
| 2.12.01.2. | 06 | 09 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 06 | 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 34.757.000 | |
| 2.12.01.2. | 06 | 11 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | 0 | |

| Kode | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Pagu Indikatif APBD | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.12.01.2. | 06 | 12 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **37.510.000.00** | |
| 2.12.01.2. | 07 | 05 | Pengadaan Mebel | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 | 37.510.000.00 | |
| 2.12.01.2. | 07 | 08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **1.118.407.884.00** | |
| 2.12.01.2. | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 4.440.700.00 | |
| 2.12.01.2. | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 184.800.000.00 | |
| 2.12.01.2. | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 14 | 929.167.184.00 | |
| 2.12.01.2. | 09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **46.500.000.00** | |
| 2.12.01.2. | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 11 | 31.500.000.00 | |
| 2.12.01.2. | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 | 1.200.000.00 | |
| 2.12.01.2. | 09 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Perizinan Alat Besar | | 0 | |
| 2.12.01.2. | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20 | 13.800.000.00 | |
| 2.12.01.2. | 09 | 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | |
| 2.12.01.2. | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| 2.12.02 | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **80** | **36.208.600.00** | |
| 2.12.02.2. | 01 | | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **99,4 & 26** | **28.500.000.00** | |

| Kode | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Pagu Indikatif APBD | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.12.02.2. | 01 | 01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 150 | 9.300.000.00 | |
| 2.12.02.2. | 01 | 02 | Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 180.000 | 19.200.000.00 | |
| 2.12.02.2. | 01 | 03 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 01 | 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 01 | 05 | Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 01 | 06 | Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 01 | 07 | Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 01 | 08 | Pengumpulan. Analisis. dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 02 | | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **100** | **1.708.600.00** | |
| 2.12.02.2. | 02 | 01 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian. dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 02 | 02 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | 5 | 1.708.600.00 | |
| 2.12.02.2. | 03 | | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **50** | **6.000.000.00** | |
| 2.12.02.2. | 03 | 01 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 12 | 2.400.000.00 | |

| Kode | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Pagu Indikatif APBD | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.12.02.2. | 03 | 02 | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 03 | 03 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 03 | 04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 03 | 05 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 03 | 06 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk | 3 | 3.600.000.00 | |
| 2.12.02.2. | 03 | 07 | Komunikasi. Informasi. dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 03 | 08 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 04 | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | | **0** | |
| 2.12.02.2. | 04 | 01 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan. Formulir. dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 04 | 02 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk | | 0 | |
| 2.12.02.2. | 04 | 03 | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | | 0 | |
| | | | | | | |
| 2.12.03 | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **98** | **504.335.600.00** | |
| 2.12.03.2. | 01 | | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **97,5** | **1.335.600.00** | |
| 2.12.03.2. | 01 | 01 | Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | | 0 | |

| Kode | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Pagu Indikatif APBD | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.12.03.2. | 01 | 02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 01 | 03 | Pengumpulan. Analisis. dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 01 | 04 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 01 | 05 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | 4 | 1.335.600.00 | |
| 2.12.03.2. | 02 | | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **100** | **3.000.000.00** | |
| 2.12.03.2. | 02 | 01 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah. Talak. Cerai. dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 02 | 02 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 02 | 03 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam | | 0 | |

| Kode | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Pagu Indikatif APBD | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | | | |
| 2.12.03.2. | 02 | 04 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 02 | 05 | Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 02 | 06 | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil | 15 | 3.000.000.00 | |
| 2.12.03.2. | 02 | 07 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 02 | 08 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 02 | 09 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 02 | 10 | Komunikasi. Informasi. dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 02 | 11 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 03 | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **100** | **500.000.000.00** | |
| 2.12.03.2. | 03 | 01 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan. Formulir. dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 03 | 02 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil | | 0 | |

| Kode | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Pagu Indikatif APBD | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.12.03.2. | 03 | 03 | Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah. Talak. Cerai. dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil | | 0 | |
| 2.12.03.2. | 03 | 04 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | 57 | 500.000.000.00 | |
| | | | | | | |
| 2.12.04 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **100** | **59.619.000.00** | |
| 2.12.04.2. | 01 | | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **56** | **2.000.000.00** | |
| 2.12.04.2. | 01 | 01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | 0 | |
| 2.12.04.2. | 01 | 02 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | 10 | 2.000.000.00 | |
| 2.12.04.2. | 01 | 03 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | | 0 | |
| 2.12.04.2. | 02 | | **Penataan Administrasi Kependudukan** | | **0** | |
| 2.12.04.2. | 02 | 01 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian. dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | 0 | |
| 2.12.04.2. | 03 | | **Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan** | **100** | **57.619.000.00** | |
| 2.12.04.2. | 03 | 01 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan | | 0 | |

| Kode | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Pagu Indikatif APBD | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 |
| | | | Informasi Administrasi Kependudukan | | | |
| 2.12.04.2. | 03 | 02 | Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri | | 0 | |
| 2.12.04.2. | 03 | 03 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 5 | 57.619.000.00 | |
| 2.12.04.2. | 03 | 04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | 0 | |
| 2.12.04.2. | 03 | 05 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | 0 | |
| 2.12.04.2. | 03 | 06 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | | 0 | |
| 2.12.04.2. | 03 | 07 | Komunikasi. Informasi. dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | | 0 | |
| 2.12.04.2. | 03 | 08 | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | | 0 | |
| 2.12.04.2. | 04 | | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | 0 | |
| 2.12.04.2. | 04 | 01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | 0 | |
| 2.12.04.2. | 04 | 02 | Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah. Talak. Cerai. dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan | | 0 | |
| 2.12.04.2. | 04 | 03 | Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | | 0 | |

| Kode | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Pagu Indikatif APBD | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 |
| 2.12.05 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | 0 | |
| 2.12.05.2. | 01 | | | **Penyusunan Profil Kependudukan** | 0 | |
| 2.12.05.2. | 01 | 01 | | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 0 | |
| 2.12.05.2. | 01 | 02 | | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | 0 | |

Terdapat Program dan kegiatan antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten. Untuk mengatasi permasalahan yang telah tertuang dalam Berita Acara hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2024 dan 2025 telah dimuat dalam program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026. Permasalahan tersebut antara lain sulitnya penduduk rentan dalam hal ini lanjut usia (lansia) dan dhuafa untuk memiliki dokumen kependudukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan maka telah disusun Program Pendaftaran Penduduk pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan aktivitas utama jemput bola layanan khusus bagi lansia dan disabilitas (inovasi payung ladis).

Permasalahan yang dialami masyarakat terkait layanan luasnya wilayah kabupaten sehingga mereka kesulitan jika harus datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perekaman KTP-el. maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo membuka layanan di Kecamatan dan untuk pencetakan KTP-el dapat dilakukan secara online dan hasil cetak akan dikirim dengan siste bayar di tempat / *Cash On Delivery* (COD).

Kesulitan dalam pengurusan Akta Kelahiran juga menjadi kendala bagi masyarakat. hal ini telah diatasi dengan bekerjasaa dengan Puskesmas dan Rumah Sakit dengan aplikasi berbasis online yaitu Pelayanan Online Kartu Keluarga. Akta Kelahiran Dan KIA (POKAK).

# BAB V
# PENUTUP

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, hasil evaluasi renja Dinas Kependudukan dan Pencattan Sipil tahun lalu dan Tahun berjalan untuk memastikan rumusan kegiatan dan atau kegiatan baru yang disusun dapat terlaksana secara optimal.

Capaian kinerja tahun sebelumnya menunjukkan bahwa persentase perekaman KTP-el sudah mencapai target namun untuk capaian akta kelahiran dan kepemilikan KIA masih belum mencapai target. Rencana tidak lanjut dari evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu adalah sebagai berikut :

a. Penguatan Digitalisasi Layanan, dengan memperluas Kerjasama terkait inovasi membuatakn Akta Kelahiran dan KIA.
b. Perluasan Aksesibilitas dan Literasi Digital, dengan melakukan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat, khususnya daerah pedesaan.
c. Peningkatan Keamanan dan Keandalan Data, dengan memperkuat sistem keamanan data kependudukan dengan penerapan enkripsi, otentikasi berlapis, serta pemantauan kemanan jaringan.
d. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan, melakukan evaluasi tahunan terhadap efektivitas digitalisasi layanan dan aspek keamanan data.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, semoga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Maron dalam rangka menghasilkan keluaran (output) dan mencapai hasil (outcome) suatu program seperti yang direncanakan.

Probolinggo, 18 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PROBOLINGGO

**MUNARIS, S.Sos.. M.A.P.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730709 199301 1002

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

# RENCANA KERJA (RENJA)

# DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PROBOLINGGO

## TAHUN 2026

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan
(0335) 8401550
https://dpmd.probolinggokab.go.id
@dpmdprobolinggokab

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga **"Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026"** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Probolinggo, Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO

**MUNARIS, S.Sos. M.A.P**
NIP. 19730709 199301 1 002
Pembina Utama Muda

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | ii |

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i
KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4
1.4 Sistematika Penulisan ..... 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... 14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... 16
2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 ..... 17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... 28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... 28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 30
3.3 Program dan Kegiatan ..... 31
3.3.1 Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo ..... 31
3.3.2 Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo ..... 31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... 37
4.1 Jumlah Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang Direncanakan ..... 37
4.2 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang Dirinci Menurut Sumber Pendanaannya ..... 39
BAB V PENUTUP ..... 42

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Bulan Desember Tahun 2025 Kabupaten Probolinggo ..... 9

Tabel 2.2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo ..... 15

Tabel 2.3 (T-C.31) *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 Kabupaten Probolinggo ..... 19

Tabel 2.4 (T-C.32.) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 ..... 26

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo ..... 30

Tabel 3.3 (T-C.33.) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Probolinggo ..... 32

Tabel 4.1 Rincian Pagu Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo ..... 39

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029. Penyusunan Renja 2026 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dokumen Renja menjadi dasar bagi OPD dalam menampung program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam KUA PPAS Tahun 2026 serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penyusunan RKA tersebut juga digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renja Perangkat Daerah berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan di Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dalam hal pencantuman nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka nomenklatur, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta kodefikasi perangkat daerah telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan dimungkinkan dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2045 ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029;
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026; dan
17. *Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ..... Tahun ..... Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.*

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo adalah :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026;
2. Memberikan gambaran kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan misinya untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi ;
3. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo serta indikator atau ukuran keberhasilan/kegagalan pada Tahun 2026;
4. Memberikan arah/acuan dalam penyusunan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah; dan
6. Memberikan acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangka Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD dan Renstra.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD 2026

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten.

## BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menguraikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

## BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Disajikan dalam bentuk *matrik* rencana program dan kegiatan disertai penjelasan di luar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

4.1 Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan;

4.2 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

## BAB V. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Proses penyusunan perencanaan diperlukan proses evaluasi untuk mengidentifikasi sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan di tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 ini, evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang ditampilkan adalah program kegiatan tahun 2024 seperti yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo tahun 2024 yang mengacu pada RPD Kabupaten Probolinggo tahun 2024 - 2026. Hasil analisa capaian kinerja program kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut :

## Tabel 2.1 (T-C.29)
## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Bulan Desember Tahun 2025 Kabupaten Probolinggo

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=(7/6)* | *9* | *10=(5+7+9)* | *11=(10/4)* |
| **2.13** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | |
| **02.13.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.** | **80%** | **85** | **81%** | **78,1** | **96,42** | **79%** | **163,89** | **204,86%** |
| 2.13.01.2 | Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnnya pelayanan administrasi perkantoran | 15 | 85 | 81% | 80,97 | 99,97 | **15** | 180,97 | 1206,47% |
| 2.13.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan terselesaikan tepat waktu tepat waktu | 15 | 8 | 9 | 9 | 99,97 | 15 | 32 | 213,33% |
| 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase Admimistrasi Keuangan Daerah terselesaikan tepat waktu | 1 | 85 | 5% | 4,88 | 97,59 | 1 | 90,88 | 9088,00% |
| 2.13.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN terbayar tepat waktu | 28 | 24 | 35 | 32,72 | 93,49 | 28 | 84,72 | 302,57% |
| 2.13.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD | Jumlah Pelaksanaan Akutansi SKPD tersedia dalam 1 tahun | 12 | 1 | 1 | 99,86 | 99,86 | 12 | 112,86 | 940,50% |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | 9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Penyusunan Laporan Keuanangan Akhir Tahun SKPD terselesaikan tepat waktu | 2 | | 1 | 99,42 | 99,42 | 2 | 101,42 | 5071,00% |
| 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 | 85 | 81% | 81 | 100 | 1 | 167 | 16700,00% |
| 2.13.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 | 0 | 15 | 15 | 100 | 12 | 27 | 225,00% |
| 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 | 85 | 5% | 4,88 | 97,56 | 1 | 90,88 | 9088,00% |
| 2.13.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 3 | 5 | 5 | 5 | 99,92 | 3 | 13 | 433,33% |
| 2.13.01.2.06.03 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah pemenuhan layananan administrasi umum yang mendukung kelancaran Tusi PMD | 1 | 10 | 4 | 3,98 | 99,51 | 1 | 14,98 | 1498,00% |
| 2.13.01.2.06.04 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah mamin rapat tersedia | 1 | 11 | 5 | 4,93 | 98,67 | 1 | 16,93 | 1693,00% |
| 2.13.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetak tersedia | 1 | 12 | 5 | 4,91 | 98,27 | 1 | 17,91 | 1791,00% |
| 2.13.01.2.06.09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan luar provinsi tersedia | 12 | 10 | 5 | 4,57 | 91,43 | 12 | 26,57 | 221,42% |
| 2.13.01.2.06.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | persentase Pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | 5 | | 5% | 4,96 | 99,15 | 5 | 9,96 | 199,20% |
| 2.13.01.2.06.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka | 5 | | 3 | 2,97 | 99,15 | 5 | 7,97 | 159,40% |
| 2.13.01.2.08 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Prosentase layanan jasa penunjang urusan sesuai dengan SOP | 12 | 84 | 5% | 4,38 | 87,57 | 12 | 100,38 | 836,50% |
| 2.13.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah tenaga non PNS selama 1 tahun dan surat kabar | 12 | 11 | 5 | 4,27 | 85,4 | 12 | 27,27 | 227,25% |
| 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD sesuai dengan SOP | 5 | 81 | 5% | 4,65 | 93,09 | 5 | 90,65 | 1813,00% |
| 2.13.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | Jumlah pajak kendaraan bermotor terbayarkan | 5 | | 25 | 23,72 | 94,88 | 5 | 28,72 | 574,40% |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | |
| 2.13.01.2.09.06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah servis mobil, pprinter dan BBM eselon II dan III | 11 | 12 | 25 | 22,83 | 91,31 | 11 | 45,83 | 416,64% |
| **2.13.02** | **Program Penataan Desa** | **Persentase desa yang memiliki penataan desa baik** | **90,52%** | **79** | **81%** | **77,48** | **95,66** | **90,36%** | **157,3836** | **17386,61%** |
| 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | Prosentase Penyelenggaraan Penataan Desa | 90,52% | 79 | 81% | 77,48 | 95,66 | 90,36% | 157,3836 | 17386,61% |
| 2.13.02.2.01.02 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang melakukan penataan wilayahnya sesuai regulasi | 325 | 274 | 50 | 47,83 | 95,66 | 325 | 646,83 | 199,02% |
| 2.13.02.2.01.05 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota terfasilitasi dan tertib | 15 | 1 | | | | 15 | 16 | 106,67% |
| **2.13.03** | **Program Peningkatan Kerja Sama Desa** | **Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya** | **73,96%** | **49** | **49%** | **47,78** | **97,52** | **73,68%** | **97,5168** | **13185,07%** |
| 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin | 73,96% | 49 | 49% | 47,78 | 97,52 | 73,68% | 97,5168 | 13185,07% |
| 2.13.03.2.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 6 | 3 | 10 | 9,71 | 97,05 | 5 | 17,71 | 295,17% |
| 2.13.03.2.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 6 | 2 | 10 | 9,8 | 97,99 | 5 | 16,8 | 280,00% |
| **2.13.04** | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | **Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata yang akuntabel** | **83,2%** | **85** | **87%** | **82,22** | **94,51** | **82,82%** | **168,0482** | **20198,10%** |
| 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang dibina dan mendapat pengawasan | 83,2% | 85 | 87% | 82,22 | 94,51 | 82,82% | 168,0482 | 20198,10% |
| 2.13.04.2.01.01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan Pemerintahan Desa | 325 | 325 | 325 | 297,97 | 91,68 | 325 | 947,97 | 291,68% |
| 2.13.04.2.01.02 | Fasilitasi penyusunan produk hukum desa | Jumlah produk hukum desa tertib (baik dan benar) | 6 | 325 | 325 | 307,04 | 94,48 | 6 | 638,04 | 10634,00% |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa | Jumlah dokumen perencanaan yang baik, benar, akuntable dan mudah aplikasi | 325 | 325 | | | | 325 | 650 | 200,00% |
| 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Desa yang melakukaan penatausahaan keuangan dengan baik | 325 | 325 | 325 | 311,86 | 95,96 | 325 | 961,86 | 295,96% |
| 2.13.04.2.01.04 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terbina | 325 | 325 | 325 | 288,1 | 88,65 | 325 | 938,1 | 288,65% |
| 2.13.04.2.01.08 | Pembinaan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa | Jumlah BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa terfasilitasi dan terbina | 325 | 195 | 1 | 94,63 | 94,63 | 325 | 614,63 | 189,12% |
| 2.13.04.2.01.09 | Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa tepat waktu | 8 | | | | | 7 | 7 | 87,50% |
| 2.13.04.2.01.13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Desa yang melakukan pelaporan inventarisasi aset desa | 325 | 325 | 325 | 296,8 | 91,32 | 325 | 946,8 | 291,32% |
| 2.13.04.2.01.15 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa Yang diFasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 325 | 50 | 40 | 38,71 | 96,77 | 325 | 413,71 | 127,30% |
| 2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 325 | 180 | 325 | 318,85 | 98,11 | 325 | 823,85 | 253,49% |
| **2.13.05** | **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** | **Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan** | **75,70%** | **74** | **4** | **3,496** | **87,42** | **75,32%** | **78,2492** | **10336,75%** |
| 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan | 75,70% | 74 | 325 | 284,12 | 87,42 | 75,32% | 358,8732 | 47407,29% |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | 12 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa yang dibina | 325 | 325 | 325 | 316,25 | 97,31 | 325 | 966,25 | 297,31% |
| 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Usaha Masyarakat Desa yang terfasilitasi | 325 | 1 | 325 | 85,43 | 26,29 | 325 | 411,43 | 126,59% |
| 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 325 | | 1 | 97,41 | 97,41 | 325 | 422,41 | 129,97% |
| 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Tim Penggerak PPK Desa yang terfasilitasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300,00% |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan kegiatan yang penuh tantangan, mengingat keberagaman karakteristik yang dimiliki oleh Kepala Desa maupun masyarakat, serta adanya berbagai kepentingan yang perlu dipertimbangkan. Kompleksitas masalah yang muncul merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dan harus dihadapi dengan bijak. Meskipun demikian, hal ini tidak seharusnya menjadi penghalang, melainkan justru sebuah tantangan yang dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo memiliki peran penting dalam membantu Bupati menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo memiliki enam fungsi utama, yaitu:

1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tolok ukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo berdasarkan amanat RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029 yaitu menunjang Misi 3 SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN yaitu **"Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang Terjangkau"**. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo yaitu Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa dengan indikator Persentase Desa Mandiri. Tujuan tersebut telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029 dengan menetapkan sasaran yakni Meningkatnya Kemandirian Desa dengan indikator Indeks Desa.

Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dapat dilihat di Tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel 2.2 (T-C.30)**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo**

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Restra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Persentase Desa Mandiri | | Peningkatan Status Desa Mandiri | 16,00 | 40,00 | 42,46 | 44,92 | 32,31 | NA | 42,46 | 44,92 | |

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menurut Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan dapat berasal dari beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dari kualitas dan kuantitas;
2. Keterbatasan anggaran akibat refocusing;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengumpulan data;
4. Kurangnya sarana dan prasarana;
5. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait program/kegiatan yang ada di desa;
6. Diperlukannya pembinaan karakter perangkat dan masyarakat desa dalam mengelola proses pembangunan di daerahnya; dan
7. Keinginan desa untuk bekerjasama dengan desa lainnya dan/atau pihak ketiga masih rendah.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di tingkat desa;
2. Mengelola keterbatasan anggaran secara efektif akibat refocusing, tanpa mengurangi kualitas dan cakupan layanan serta program pemberdayaan masyarakat desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengumpulan data sebagai dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan responsif;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dan/atau memanfaatkan yang ada;
5. Memperkuat koordinasi lintas Perangkat Daerah, agar pelaksanaan program pembangunan desa berjalan sinergis dan tidak tumpang tindih;
6. Membangun karakter dan kapasitas kepemimpinan perangkat desa serta masyarakat, agar mampu mengelola pembangunan secara partisipatif, transparan, dan berkelanjutan; dan
7. Mendorong kolaborasi antar desa dan kemitraan dengan pihak ketiga, guna memperkuat jejaring, meningkatkan inovasi, dan memperluas akses sumber daya pembangunan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah dengan :

1. Semakin strategisnya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya;
3. Tersedianya potensi sumber daya aparatur desa yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Semakin cerdasnya masyarakat di desa untuk mengawal pembangunan desanya.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Optimalisasi Pembiayaan dan Efisiensi Anggaran;
3. Penguatan Literasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengumpulan Data;
4. Penyediaan dan Modernisasi Sarana dan Prasarana Pendukung;
5. Penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait program/kegiatan yang ada di desa;
6. Pembinaan karakter yang intensif kepada perangkat dan masyarakat desa dalam mengelola proses pembangunan di daerahnya; dan
7. Peningkatan fasilitasi agar desa tertarik untuk melakukan kerjasama dengan desa lainnya dan/atau pihak ketiga.

## 2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD 2026

*Review* terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. *Review* terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo tidak mengalami perubahan yang signifikan dan telah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan dan merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

Rancangan RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta perkiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan rancangan RKPD akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan swasta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKPD Kabupaten Probolinggo akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, rancangan RKPD Kabupaten Probolinggo juga merupakan acuan bagi PD dalam menyempurnakan Renja PD untuk tahun yang sama.

*Review* terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal Renja PD, termasuk dalam hal penganggaran. Hal ini dilakukan untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo sehingga penggunaan anggaran dari APBD diharapkan tepat sasaran, efektif dan efisien.

## Tabel 2.3 (T-C.31)
## *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 Kabupaten Probolinggo

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Tahun (n) | Pagu Indikatif (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | **2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kab. Probolinggo** | **Nilai LHE AKIP PD (Nilai)** | **80,00%** | **4.953.229.010** | **2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kab. Probolinggo** | **Nilai LHE AKIP PD (Nilai)** | **80,00%** | | **4.953.229.010** | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo | Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 15 Dokumen | 16.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo | Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 15 Dokumen | | 16.000.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 Dokumen | 16.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 Dokumen | | 16.000.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo | Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 3.968.307.458 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo | Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 3.968.307.458 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Probolinggo | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 28 Orang/Bulan | 3.957.807.458 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Probolinggo | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 28 Orang/Bulan | | 3.957.807.458 | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 7.500.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | | 7.500.000 | |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---|---|
| | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Probolinggo | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 3.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Probolinggo | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | | 3.000.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo | Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 2.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo | Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 2.000.000 | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 2.000.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | | 2.000.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo | Prosentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 412.300.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Probolinggo | Prosentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 412.300.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Probolinggo | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 45.300.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Probolinggo | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 45.300.000 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Probolinggo | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 4.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Probolinggo | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 4.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Probolinggo | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 23.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Probolinggo | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 23.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan | Kab. Probolinggo | Jumlah Paket Barang Cetakan dan | 1 Paket | 40.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Kab. Probolinggo | Jumlah Paket Barang Cetakan dan | 1 Paket | | 40.000.000 | |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | 20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penggandaan | | Penggandaan yang Disediakan | | | Penggandaan | | Penggandaan yang Disediakan | | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Probolinggo | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 300.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Probolinggo | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 300.000.000 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Probolinggo | Prosentase Pemenuhan Barang Milik Daerah yang disesuaikan dengan RKBMD | 5 Unit | 13.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Probolinggo | Prosentase Pemenuhan Barang Milik Daerah yang disesuaikan dengan RKBMD | 5 Unit | | 13.000.000 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Probolinggo | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 13.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Probolinggo | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 13.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Probolinggo | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | 321.621.552 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Probolinggo | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | | 321.621.552 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Probolinggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 321.621.552 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Probolinggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 321.621.552 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Probolinggo | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16 Unit | 220.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Probolinggo | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16 Unit | | 220.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Probolinggo | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | 150.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Probolinggo | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | | 150.000.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Probolinggo | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 11 | 70.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Probolinggo | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 11 | | 70.000.000 | |
| | 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA | Kab. Probolinggo | Persentase desa yang | | | 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA | Kab. Probolinggo | Persentase desa yang | | | | |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---|---|
| | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SAMA DESA | | memiliki aksesbilitas yang berkualitas (%) | 90,52% | 30.000.000 | SAMA DESA | | memiliki aksesbilitas yang berkualitas (%) | 90,52% | | 30.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Penataan Desa | Kab. Probolinggo | Persentase desa yang memiliki aksesbilitas yang berkualitas (%) | 90,52 | 30.000.000 | Penyelenggaraan Penataan Desa | Kab. Probolinggo | Persentase desa yang memiliki aksesbilitas yang berkualitas (%) | 90,52 | | 30.000.000 | |
| | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | 325 Desa | 9.750.000 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | 325 Desa | | 9.750.000 | |
| | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 15 Laporan | 20.250.000 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 15 Laporan | | 20.250.000 | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Kab. Probolinggo | Persentase peningkatan kerja sama desa yang mengembangkan aksesbilitas dan ekonomi (%) | 73,96% | 25.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Kab. Probolinggo | Persentase peningkatan kerja sama desa yang mengembangkan aksesbilitas dan ekonomi (%) | 73,96% | | 25.000.000 | |
| | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Kab. Probolinggo | Persentase peningkatan kerja sama desa yang mengembangkan aksesbilitas dan ekonomi (%) | 73,96% | 25.000.000 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Kab. Probolinggo | Persentase peningkatan kerja sama desa yang mengembangkan aksesbilitas dan ekonomi (%) | 73,96% | | 25.000.000 | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen) | 6 Dokumen | 9.875.000 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen) | 6 Dokumen | | 9.875.000 | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen) | 6 Dokumen | 15.125.000 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen) | 6 Dokumen | | 15.125.000 | |
| | PROGRAM ADMINISTRASI | Kab. Probolinggo | Persentase administrasi | | | PROGRAM ADMINISTRASI | Kab. Probolinggo | Persentase | | | | |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---|---|
| | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PEMERINTAHAN DESA | | Pemerintahan Desa yang memberikan layanan dasar, dan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel (%) | 83,2% | 4.146.850.575,8 | PEMERINTAHAN DESA | | administrasi Pemerintahan Desa yang memberikan layanan dasar, dan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel (%) | 83,2% | | 4.146.850.575,8 | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Kab. Probolinggo | Persentase administrasi Pemerintahan Desa yang memberikan layanan dasar, dan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel (%) | 83,2% | 4.146.850.575,8 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Kab. Probolinggo | Persentase administrasi Pemerintahan Desa yang memberikan layanan dasar, dan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel (%) | 83,2% | | 4.146.850.575,8 | |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 325 Dokumen | 50.000.000 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 325 Dokumen | | 50.000.000 | |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 325 Dokumen | 15.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 325 Dokumen | | 15.000.000 | |
| | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa | 325 Dokumen | 75.000.000 | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa | 325 Dokumen | | 75.000.000 | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 325 Dokumen | 3.621.850.575,8 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 325 Dokumen | | 3.621.850.575,8 | |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 325 Orang | 50.000.000 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 325 Orang | | 50.000.000 | |
| | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja | 325 Dokumen | 80.000.000 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga | 325 Dokumen | | 80.000.000 | |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | 23 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sama antar Desa | | | | | Kerja Sama antar Desa | | | | |
| | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 8 Laporan | 70.000.000 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 8 Laporan | | 70.000.000 | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 325 Dokumen | 60.000.000 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 325 Dokumen | | 60.000.000 | |
| | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | 325 Desa | 50.000.000 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | 325 Desa | | 50.000.000 | |
| | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 325 Dokumen | 75.000.000 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 325 Dokumen | | 75.000.000 | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Kab. Probolinggo | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LKD, Lembaga Adat, dan Masyakarat Hukum Adat yang mningkatkan pertumbungan sosial dan ekonomi | 75,7 | 768.000.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Kab. Probolinggo | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LKD, Lembaga Adat, dan Masyakarat Hukum Adat yang mningkatkan pertumbungan sosial dan ekonomi | 75,7 | | 768.000.000 | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Probolinggo | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LKD, Lembaga Adat, dan Masyakarat Hukum Adat yang mningkatkan pertumbungan sosial dan ekonomi | 75,7 | 768.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat | Kab. Probolinggo | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LKD, Lembaga Adat, dan Masyakarat Hukum Adat yang mningkatkan pertumbungan sosial dan ekonomi | 75,7 | | 768.000.000 | |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | 24 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Kab. Probolinggo | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 325 Lembaga | 100.000.000 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Kab. Probolinggo | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 325 Lembaga | | 100.000.000 | |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 325 Dokumen | 150.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 325 Dokumen | | 150.000.000 | |
| | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Kab. Probolinggo | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 325 Laporan | 105.000.000 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Kab. Probolinggo | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 325 Laporan | | 105.000.000 | |
| | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen | 413.000.000 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Kab. Probolinggo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen | | 413.000.000 | |
| **TOTAL** | | | | | **9.923.079.585.80** | | | | | | **9.923.079.585.80** | |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | 25 |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo memegang peran strategis sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Seiring berjalannya waktu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo terus menerima usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut ini adalah daftar usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat:

**Tabel 2.4 (T-C.32.)**
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| 1 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Kab. Probolinggo | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LKD, Lembaga Adat, dan Masyakarat Hukum Adat yang mningkatkan pertumbungan sosial dan ekonomi (%) | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum | | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LKD, Lembaga Adat, dan Masyakarat Hukum Adat yang mningkatkan pertumbungan sosial dan ekonomi | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 413.000.000<br>1 Dokumen | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**. Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional di bidang pangan dan energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Sebagai penjabaran dari tema tersebut, pembangunan pada tahun 2026 difokuskan pada lima prioritas utama. Pertama, percepatan digitalisasi pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Kedua, pengelolaan sampah yang berkelanjutan guna mendukung pembangunan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Ketiga, pengembangan Sekolah Rakyat sebagai bentuk pemberdayaan komunitas dan perluasan akses pendidikan non-formal yang inklusif. Keempat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program terpadu yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Dan kelima, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi rakyat di tingkat lokal, guna menciptakan kemandirian ekonomi yang berbasis komunitas.

Kelima prioritas tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

**Kebijakan Provinsi Jawa Timur**

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 memperhatikan strategi dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026, yang kemudian diselaraskan dengan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

Adapun Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi"**, dengan prioritas pembangunan, yaitu :

1. Jatim Sejahtera : Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui perlindungan social yang adaptif pemberdayaan masyrakat dan kemandirian pedesaan dengan pendekatan lintas sectoral-spasial berbasis data terpadu;
2. Jatim Kerja : Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan, iklim investasi dan stabilitas ekonomi;

3. Jatim Akses : Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan;
4. Jatim Cerdas : Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (*education for all*) yang berkualiats, merata, dan berkeadilan;
5. Jatim Sehat : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Cover Health;
6. Jatim Berkah : Memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif;
7. Jatim Agro : Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dna nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan nasional;
8. Jatim Harmoni : Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif melalui pengembangan nilai – nilai kesalehan social, berjiwa Pancasila, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni, budaya dan prestasi olahraga;
9. Jatim Lestari : Menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas lingkungan, dan ketahanan iklim dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

**Keterkaitan Kebijakan Nasional dan Provinsi dengan Kebijakan Kabupaten Probolinggo**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo menyusun program dan kegiatan tahunan dengan mengedepankan prinsip sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Penyusunan program tersebut tidak dilakukan secara terpisah, melainkan secara strategis mengacu pada arah kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta perencanaan jangka panjang dan menengah daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

Dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dan desa yang dijalankan tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan regional. Hal ini mencakup upaya-upaya dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kepala desa, serta pengembangan potensi ekonomi desa secara berkelanjutan.

Sementara itu, keterpaduan dengan RPJPD dan RKPD Kabupaten Probolinggo menjadi landasan untuk menjaga konsistensi arah

pembangunan daerah dalam jangka panjang maupun tahunan. Melalui pendekatan ini, kesinambungan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terjamin dari tahun ke tahun, serta mampu merespons kebutuhan lokal secara efektif tanpa keluar dari kerangka pembangunan nasional dan regional.

Guna mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka ditetapkan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 adalah : **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Kawasan Strategis Yang Didukung Oleh Pemenuhan Infrastruktur Berkelanjutan dan Peningkatan Produksi Pangan"**.

Guna mendukung tercapainya tema diatas maka prioritas pembangunan Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2026 adalah Peningkatan Tata Kelola dan Layanan Publik yang Bersih dan Akuntabel yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan kemandirian Masyarakat Miskin;
3. Peningkatan ketahanan daerah;
4. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Basis;
5. Peningkatan Ketahanan Pangan;
6. Peningkatan Realisasi Investasi;
7. Penyediaan Layanan Infrastruktur Yang Berkualitas.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo yakni **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa** dengan indikator Prosentase Desa Mandiri. Adapun Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Desa
   Indikator: Indeks Desa
2. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah
   Indikator: Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah.

**Tabel 3.2**
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun: | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa | | Persentase Desa Mandiri | Persen | 32,31 | 40,00 | 42,46 | 44,92 | 47,38 | 49,85 | 52,31 |
| | Meningkatnya Kemandirian Desa | Indeks Desa | Indeks | 486,49 | 498,43 | 500,85 | 504,17 | 507,5 | 510,82 | 514,14 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Persen | 78,81 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

## 3.3 Program dan Kegiatan

### 3.3.1 Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2026 sesuai dengan Program yang tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029, yaitu :

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### 3.3.2 Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2026. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan yang mencakup 85 (delapan puluh lima) sub kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.33. :

## Tabel 3.3 (T-C.33.)
## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
## Kabupaten Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* |
| **02.13.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.** | **DPMD** | **80,00%** | **4.953.229.010** | **Silpa, DBH, DAU** | | **81,00%** | **5.008.300.000** |
| 2.13.01.2 | Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnnya pelayanan administrasi perkantoran | DPMD | 15 Dokumen | 16.000.000 | Silpa | | 15 Dokumen | 19.900.000 |
| 2.13.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan terselesaikan tepat waktu tepat waktu | DPMD | 15 Dokumen | 16.000.000 | Silpa | | 15 Dokumen | 19.900.000 |
| 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase Admimistrasi Keuangan Daerah terselesaikan tepat waktu | DPMD | 1 Dokumen | 3.968.307.458 | DAU, DBH | | 1 Dokumen | 3.980.242.000 |
| 2.13.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN terbayar tepat waktu | DPMD | 28 Orang/Bulan | 3.957.807.458 | DBH | | 28 Orang/Bulan | 3.961.742.000 |
| 2.13.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD | Jumlah Pelaksanaan Akutansi SKPD tersedia dalam 1 tahun | DPMD | 12 Dokumen | 7.500.000 | DAU | | 12 Dokumen | 11.500.000 |
| 2.13.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Penyusunan Laporan Keuanangan Akhir Tahun SKPD terselesaikan tepat waktu | DPMD | 2 Laporan | 3.000.000 | DAU | | 2 Laporan | 7.000.00 |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | DPMD | 1 Dokumen | 2.000.000 | Silpa | | 1 Dokumen | 5.800.000 |
| 2.13.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | DPMD | 12 Dokumen | 2.000.000 | Silpa | | 12 Dokumen | 5.800.000 |
| 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | DPMD | 1 Dokumen | 412.300.000 | Silpa | | 1 Dokumen | 432.358.000 |
| 2.13.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | DPMD | 3 Paket | 45.300.000 | Silpa | | 3 Paket | 49.000.000 |
| 2.13.01.2.06.03 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah pemenuhan layananan administrasi umum yang mendukung kelancaran Tusi PMD | DPMD | 1 Paket | 4.000.000 | Silpa | | 1 Paket | 8.000.000 |
| 2.13.01.2.06.04 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah mamin rapat tersedia | DPMD | 1 Paket | 23.000.000 | Silpa | | 1 Paket | 27.000.000 |
| 2.13.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetak tersedia | DPMD | 1 Paket | 40.000.000 | Silpa | | 1 Paket | 44.000.000 |
| 2.13.01.2.06.09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan luar provinsi tersedia | DPMD | 12 Laporan | 300.000.000 | Silpa | | 12 Laporan | 304.358.000 |
| 2.13.01.2.06.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | persentase Pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | DPMD | 5 Unit | 13.000.000 | Silpa | | 5 Unit | 17.000.000 |
| 2.13.01.2.06.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka | DPMD | 5 Unit | 13.000.000 | Silpa | | 5 Unit | 17.000.000 |
| 2.13.01.2.08 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Prosentase layanan jasa penunjang urusan sesuai dengan SOP | DPMD | 12 Laporan | 321.621.552 | DBH | | 12 Laporan | 325.000.000 |
| 2.13.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah tenaga non PNS selama 1 tahun dan surat kabar | DPMD | 12 Laporan | 321.621.552 | DBH | | 12 Laporan | 325.000.000 |
| 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD sesuai dengan SOP | DPMD | 16 Unit | 220.000.000 | Silpa | | 16 Unit | 228.000.000 |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pajak kendaraan bermotor terbayarkan | DPMD | 5 Unit | 150.000.000 | Silpa | | 5 Unit | 154.000.000 |
| 2.13.01.2.09.06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah servis mobil, pprinter dan BBM eselon II dan III | DPMD | 11 Unit | 70.000.000 | Silpa | | 11 Unit | 74.000.000 |
| **2.13.02** | **Program Penataan Desa** | **Persentase desa yang memiliki penataan desa baik** | **Kab. Probolinggo** | **90,52%** | **30.000.000** | **Silpa** | | **91,04%** | **30.400.000** |
| 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | Prosentase Penyelenggaraan Penataan Desa | Kab. Probolinggo | 90,52 | 30.000.000 | Silpa | | 91,04% | 30.400.000 |
| 2.13.02.2.01.02 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang melakukan penataan wilayahnya sesuai regulasi | Desa | 325 Desa | 9.750.000 | Silpa | | 325 Desa | 9.950.000 |
| 2.13.02.2.01.05 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota terfasilitasi dan tertib | Desa | 15 Laporan | 20.250.000 | Silpa | | 15 Laporan | 20.450.000 |
| **2.13.03** | **Program Peningkatan Kerja Sama Desa** | **Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya** | **Kab. Probolinggo** | **73,96%** | **25.000.000** | **Silpa** | | **74,48%** | **25.300.000** |
| 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin | Kab. Probolinggo | 73,96% | 25.000.000 | Silpa | | 74,48% | 25.300.000 |
| 2.13.03.2.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Desa | 6 Dokumen | 9.875.000 | Silpa | | 7 Dokumen | 10.025.00 |
| 2.13.03.2.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Desa | 6 Dokumen | 15.125.000 | Silpa | | 7 Dokumen | 15.275.000 |
| **2.13.04** | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | **Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata yang akuntabel** | **Kab. Probolinggo** | **83,2%** | **4.146.850.575,8** | **Silpa, BK Provinsi, DBH, Pajak Rokok** | | **83,73%** | **4.193.000.000** |
| 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan | Persentase Desa yang dibina dan mendapat pengawasan | Kab. Probolinggo | 83,2% | 4.146.850.575,8 | Silpa, BK Provinsi, | | 83,73% | 4.193.000.000 |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | DBH, Pajak Rokok | | | |
| 2.13.04.2.01.01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan Pemerintahan Desa | Desa | 325 Dokumen | 50.000.000 | Silpa | | 325 Dokumen | 54.610.000 |
| 2.13.04.2.01.02 | Fasilitasi penyusunan produk hukum desa | Jumlah produk hukum desa tertib (baik dan benar) | Desa | 325 Dokumen | 15.000.000 | Silpa | | 6 Dokumen | 19.620.000 |
| 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa | Jumlah dokumen perencanaan yang baik, benar, akuntable dan mudah aplikasi | Desa | 325 Dokumen | 75.000.000 | Silpa | | 325 Dokumen | 79.615.000 |
| 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Desa yang melakukaan penatausahaan keuangan dengan baik | Desa | 325 Dokumen | 3.621.850.575,8 | DBH | | 325 Dokumen | 3.626.465.058 |
| 2.13.04.2.01.04 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terbina | Desa | 325 Orang | 50.000.000 | BK Provinsi | | 325 Dokumen | 54.610.000 |
| 2.13.04.2.01.08 | Pembinaan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa | Jumlah BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa terfasilitasi dan terbina | Desa | 325 Dokumen | 80.000.000 | Pajak Rokok | | 325 Dokumen | 84.620.000 |
| 2.13.04.2.01.09 | Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa tepat waktu | Desa | 8 Laporan | 70.000.000 | DAU | | 15 Laporan | 74.610.000 |
| 2.13.04.2.01.13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Desa yang melakukan pelaporan inventarisasi aset desa | Desa | 325 Dokumen | 60.000.000 | Silpa | | 325 Dokumen | 64.615.000 |
| 2.13.04.2.01.15 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa Yang diFasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Desa | 325 Desa | 50.000.000 | Pajak Rokok | | 325 Desa | 54.620.000 |
| 2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Desa | 325 Dokumen | 75.000.000 | Pajak Rokok | | 325 Dokumen | 79.614.942 |
| **2.13.05** | **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** | **Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan** | **Kab. Probolinggo** | **75,7** | **768.000.000** | **DAU Pendidkikan, BK Provinsi, Pajak Rokok, DAU** | | **76,22%** | **776.600.000** |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan | Kab. Probolinggo | 75,7 | 768.000.000 | DAU Pendidkikan, BK Provinsi, Pajak Rokok, DAU | | **76,22%** | **776.600.000** |
| 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa yang dibina | Lembaga Desa | 325 Lembaga | 100.000.000 | DAU Pendidikan | | 325 Lembaga | 102.600.000 |
| 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Usaha Masyarakat Desa yang terfasilitasi | Desa | 325 Dokumen | 150.000.000 | BK Provinsi | | 325 Dokumen | 153.000.000 |
| 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Desa | 325 Laporan | 105.000.000 | Pajak Rokok | | 325 Laporan | 108.000.000 |
| 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Tim Penggerak PPK Desa yang terfasilitasi | Desa | 1 Dokumen | 413.000.000 | Silpa | | 1 Dokumen | 413.000.000 |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL | |
|---|---|---|
| | | |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## 4.1 Jumlah Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang Direncanakan

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Probolinggo yang diselaraskan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Renja 2026 ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo menetapkan 4 program utama yakni Program Penataan Desa dengan satu kegiatan dan dua sub kegiatan, Program Peningkatan Kerja Sama Desa dengan satu kegiatan dan dua sub kegiatan, Program Peningkatan Kerja Sama Desa dengan satu kegiatan dan 10 sub kegiatan, dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan satu kegiatan dan empat sub kegiatan. Di samping itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga melakukan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tujuh kegiatan dan 14 sub kegiatan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang bakal dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo pada tahun 2026 :

1. Program : Program Penataan Desa
   1) Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa
      - Sub Kegiatan: Fasilitasi Tata Wilayah Desa
      - Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program : Program Peningkatan Kerja Sama Desa
   1) Kegiatan : Fasilitasi Kerja sama antar Desa
      - Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
      - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
3. Program : Program Administrasi Pemerintahan
   1) Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
      - Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
      - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
      - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

4. Program : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
   1) Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
      - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
      - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
      - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
5. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1) Kegiatan: Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3) Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
   4) Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6) Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7) Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Jadi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo pada tahun 2026 akan menjalakan 5 program, 11 kegiatan, dan 32 sub kegiatan.

## 4.2 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang Dirinci Menurut Sumber Pendanaannya

Dari 5 program, 11 kegiatan, dan 32 sub kegiatan yang bakal dilakukan pada tahun 2026 memerlukan pagu indikatif sebesar 10.874.087.544,38. Untuk lebih detailnya, berikut ini rincian anggaran yang dibutuhkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo pada tahun 2026 :

**Tabel 4.1**
**Rincian Pagu Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026**

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sumber Dana | Pagu Indiaktif |
|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* |
| **PROGRAM PENATAAN DESA** | | **30.000.000,00** |
| ***Penyelenggaraan Penataan Desa*** | | **30.000.000,00** |
| Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Silpa | 9.750.000,00 |
| Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Silpa | 20.250.000,00 |
| **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | | **25.000.000,00** |
| ***Fasilitasi Kerja Sama antar Desa*** | | 25.000.000,00 |
| Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Silpa | 9.875.000,00 |
| Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Silpa | 15.125.000,00 |
| **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | **4.146.850.575,80** |
| ***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*** | | **4.146.850.575,80** |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Silpa | 50.000.000,00 |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Silpa | 15.000.000,00 |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Silpa | 75.000.000,00 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | DBH | 3.621.850.575,80 |

| | | |
|---|---|---|
| Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | BK Provinsi | 50.000.000,00 |
| Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Pajak Rokok | 80.000.000,00 |
| Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | DAU | 70.000.000,00 |
| Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Silpa | 60.000.000,00 |
| Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Pajak Rokok | 50.000.000,00 |
| Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Pajak Rokok | 75.000.000,00 |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | **768.000.000,00** |
| ***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | | **768.000.000,00** |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | DAU Pendidikan | 100.000.000,00 |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | BK Provinsi | 150.000.000,00 |
| Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Pajak Rokok | 75.500.000,00 |
| Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | DAU | 413.000.000,00 |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **4.953.229.010,00** |
| ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | | **16.000.000,00** |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Silpa | 16.000.000,00 |
| ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | | **3.968.307.458,00** |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DBH | 3.957.807.458,00 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | DAU | 7.500.000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | DAU | 3.000.000,00 |
| ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | | **300.000,00** |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Silpa | **300.000,00** |
| ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | | **414.000.000,00** |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Silpa | 47.000.000,00 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Silpa | 4.000.000,00 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Silpa | 23.000.000,00 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Silpa | 40.000.000,00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Silpa | 300.000.000,00 |
| ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | | **13.000.000,00** |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Silpa | 13.300.000,00 |
| ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | | **321.621.552,00** |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DBH | 321.621.552,00 |
| ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | | **220.000.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Silpa | 150.000.000,00 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Silpa | 70.000.000,00 |
| **TOTAL** | | **9.923.079.585.80** |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Penyusunan Renja bertujuan untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar dapat terwujud pada Tahun 2026 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah. Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan/karyawati Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dan diiringi peran aktif *stakeholder* pembangunan Kabupaten Probolinggo. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Dengan demikian, setelah Renja ini ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo memiliki acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakannya pada Tahun Anggaran 2026.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 serta memperhatikan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renja ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai dilakukan untuk mengukur ketercapaian target dan kinerja, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan masukan untuk perbaikan dan penyusunan Renja di tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun dengan jadwal sebagai berikut:

1. Evaluasi Renja Triwulan 1: Januari, Februari, dan Maret
2. Evaluasi Renja Triwulan 2: April, Mei, dan Juni
3. Evaluasi Renja Triwulan 3: Juli, Agustus, dan September
4. Evaluasi Renja Triwulan 4: Oktober, November, dan Desember

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan RPJMD dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

# RENCANA KERJA
# 2026

*Prepared by :*

## DINAS PERHUBUNGAN
## KABUPATEN PROBOLINGGO


dishubkabprobolinggo

dishubkabprobolinggo@gmail.com

0812-1677-2396 (Whatsapp)

Jl. Panglima Sudirman No. 2 Kota Probolinggo

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga ***"Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026"*** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2026 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Probolinggo, September 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**EDY SURYANTO,S.Sos,M.Si**
NIP. 19700108 199602 1 001

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**

**DAFTAR ISI** ..... **ii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **iii**

**DAFTAR TABEL** ..... **iii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Landasan Hukum ..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 15

1.4 Sistematika Penulisan ..... 16

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU** ..... **17**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... 17

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 36

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 36

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 40

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 57

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH** ..... **58**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... 58

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 60

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** ..... **61**

4.1 Program dan Kegiatan ..... 61

**BAB V PENUTUP** ..... **74**

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja ..... 74

5.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan ..... 75

5.3 Rencana Tindak Lanjut ..... 75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renja PD ..... 2
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan..... 5

## DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Nilai Capaian Program Tahun 2023 ..... 19
Tabel 2 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 ..... 21
Tabel 2 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 36
Tabel 2 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024..... 41
Tabel 2 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo ..... 57
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ..... 60
Tabel 4. 1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 .....65

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo di bidang Perhubungan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Penyusunan Renja 2026 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat.

Dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo tahun 2026 ini, selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam pelayanan masyarakat tahun 2026 dan menjadi dasar penyusunan RKA Dinas Perhubungan tahun anggaran 2026. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo ini akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Perhubungan khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya..

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) didasarkan pada penjaringan aspirasi masyarakat yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan 2026 dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini harus ada sinkronisasi dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Renstra SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

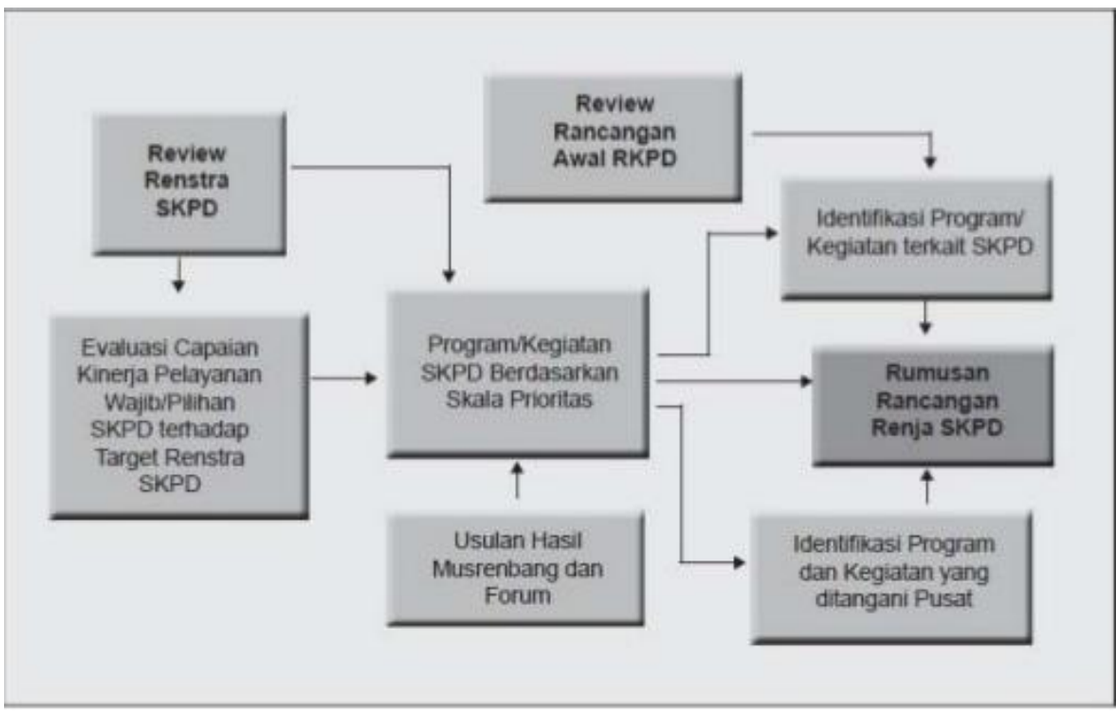


Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renja PD

Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana kegiatan tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, dan program kegiatan Dinas Perhubungan. Sebagai rencana operasional Dinas Perhubungan merupakan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011- 2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;

Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo berperan dalam koordinasi, sinkronisasi, prioritasi rencana program dan kegiatan pembangunan. Peran tersebutdengan cara Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur bidang Perhubungan melalui Meningkatnya Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi dan fasilitas keselamatan Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan. Kemudian diturunkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan dalam BAB XI pasal 142 bahwa Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X adalah sebagai berikut:

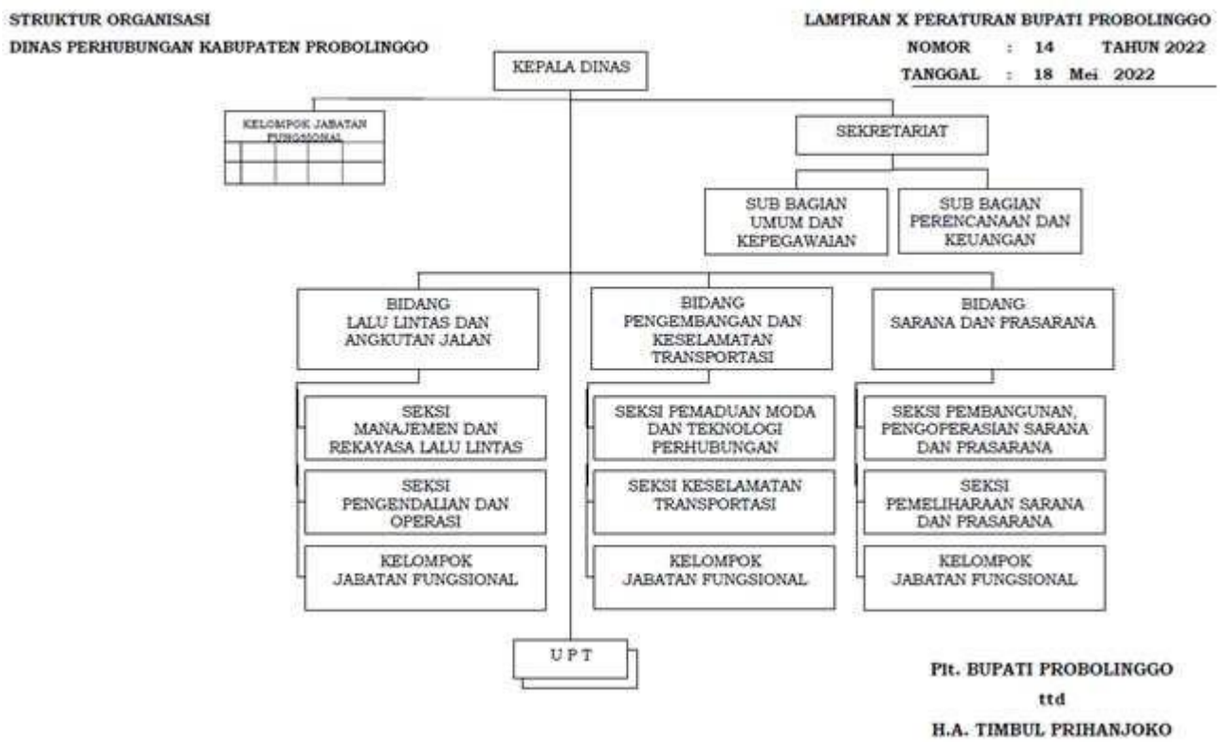


Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

-

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. maka Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo nomor 14 tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Adapun tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sesuai peraturan daerah tersebut adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perhubungan.

Selanjutnya tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan lebih dijabarkan lagi sebagai berikut :

- Merumuskan, membina dan mengendalikan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perhubungan ;
- Merumuskan, membina dan mengendalikan tugas pembantuan yang menyangkut bidang Perhubungan yang diberikan oleh pemerintah propinsi.

Disamping melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi :

- Penetapan rencana kerja dan program/kegiatan;
- Pengkoordinasian rencana kerja dan program/kegiatan;
- Penyelenggaraan pembinaan teknis Perhubungan;
- Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis dan program;
- Pengkoordinasian seluruh kebijakan kegiatan lintas program atau lintas sektoral;
- Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, humas dan surat menyurat serta informasi di bidang perhubungan.
- Penetapan keputusan dan penertiban perijinan sesuai dengan kewenangan;
- Pelaporan program dan kegiatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

**Susunan Organisasi Dinas Perhubungan**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membawahi:
    a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
    b. Seksi Pengendalian dan Operasi;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi, membawahi :
    a. Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan
    b. Seksi Keselamatan Transportasi;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
    a. Seksi Pembangunan, Pengoperasian sarana dan Prasarana;
    b. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. UPT;

Adapun bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo adalah sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi berikut ini :

- **Kepala Dinas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 70 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas, UPT dan kelompok jabatan fungsional, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas, UPT dan kelompok jabatan fungsional, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas, UPT dan kelompok jabatan fungsional serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi;
d. Pelaksanaan administrasi dibidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas, UPT dan kelompok jabatan fungsional serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi;
e. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan seluruh kebijakan kegiatan baik lintas program maupun lintas sektoral;
f. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat serta informasi dibidang perhubungan;
g. Penetapan keputusan dan penerbitan perizinan sesuai dengan kewenangan;
h. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

- **Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan,kearsipan serta barang milik daerah pada Dinas Perhubungan serta UPT;

d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- **Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis program kelalu lintasan dan angkutan jalan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja;
b. Perumusan dan penyelenggaraan program keselamatan dan rekayasa lalu lintas di daerah;
c. Perumusan dan penyelenggaraan kegiatan pengawasan serta pengendalian lalu lintas di daerah;
d. Perumusan dan penyelenggaraan operasi dan penertiban lalu lintas di daerah;
e. Pelaksanaan perumusan manajemen angkutan orang, barang dan angkutan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- **Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi**

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja;
b. Pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

c. Penyelenggaraan kegiatan dalam menjamin keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam wadah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana lalu lintas;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian;
f. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Pengawasan dan Pengendalian;
g. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelebihan muatan dan pelanggaran kelas jalan kendaraan bermotor;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- **Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas**

Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja;
b. Penyusunan ketentuan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan lalu lintas yang meliputi pengendalian bangkitan dan tarikan lalu lintas, kecepatan maksimum dan minimum serta penetapan larangan dan pengendalian penggunaan jalan;
c. Penyusunan dan penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) Kabupaten;
d. Pemberian persetujuan hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) jalan Kabupaten;
e. Pemberian rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- **Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi**

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan manajemen dan keselamatan transportasi serta perairan

daratan dan penyebrangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi mempunyai fungsi

a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan teknis pengembangan dan keselamatan transportasi;
b. Perumusan dan penyelenggaraan program Pengembangan dan keselamatan transportasi di daerah;
c. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasinal Prosedur (SOP);
d. Perumusan penyelenggaraan kegiatan pengawasan manajemen dan keselamatan transportasi di daerah;
e. Pelaksanaan verifikasi berkas perizinan dan/atau dokumen lainnya untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas;
f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program manajemen dan keselamatan transportasi;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- **Kepala Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan**

Kepala Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis manajemen sarana transportasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja;
b. Penetapan jaringan jalur transportasi;
c. Penerbitan rekomendasi teknis usaha transportasi;
d. Penerbitan rekomendasi teknis pengadaan atau pembangunan sarana prasarana transportasi;
e. Penerbitan rekomendasi teknis penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
f. Pembinaan dan pengelolaan operasional parkir daerah;
g. Pembinaan terhadap pelaku jasa usaha transportasi;
h. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Manajemen Sarana Transportasi;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- **Kepala Seksi Keselamatan Transportasi**

Kepala Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis keselamatan

transportasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja;
b. Penyusunan dan analisa daerah rawan kecelakaan;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan keselamatan transportasi;
d. Pelaksanaan inspeksi keselamatan transportasi;
e. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan keselamatan transportasi;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- **Kepala Bidang Sarana dan Prasarana**

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi

a. Perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan;
b. Perumusan dan penyusunan analisa dan evaluasi data sarana prasarana perlengkapan jalan;
c. Perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan penerangan jalan umum;
d. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasinal Prosedur (SOP);
e. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Sarana dan Prasarana;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- **Kepala Seksi Pembangunan, Pengoperasian Sarana dan Prasarana**

Kepala Seksi Pembangunan, Pengoperasian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengadaan sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pembangunan, Pengoperasian Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman kerja;
b. Perencanaan dan penyusunan pembangunan, pengembangan, sarana dan prasarana perlengkapan jalan;
c. Penentuan lokasi sarana dan prasarana perlengkapan jalan;

d. Pengadaan sarana prasarana perlengkapan jalan sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai;
e. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- **Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana**

Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan sarana prasarana yang ada di daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman kerja;
- Perencanaan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan;
- Pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana perhubungan;
- Pemeliharaan/perawatan sarana prasarana perhubungan;
- Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- **UPT**

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi serta uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Dinas Perhubungan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo 2026 yaitu untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 Memuat Program, Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Serta Prakiraan Maju Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, yaitu :

1. **Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) menjadi Aksi Tahunan:**
   Renja menerjemahkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Renstra menjadi program dan kegiatan yang lebih operasional dan spesifik untuk dilaksanakan dalam satu tahun.
2. **Menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):**
   Dokumen Renja memastikan bahwa program dan kegiatan Perangkat Daerah sejalan dan selaras dengan prioritas serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD.
3. **Sebagai Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi:**
   Renja menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan juga dasar untuk evaluasi kinerja dan capaian pelaksanaan program di tahun mendatang.
4. **Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Daerah:**
   Dengan menyelaraskan kegiatan pada skala mikro dengan tujuan pembangunan daerah, Renja berkontribusi langsung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
5. **Memastikan Keterkaitan Sistem Perencanaan:**
   Penyusunan Renja merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, memastikan adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
6. **Menentukan Kebutuhan Sumber Daya:**
   Dokumen ini berisi rencana program, kegiatan, lokasi, serta kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, sehingga dapat menjadi dasar untuk perencanaan alokasi sumber daya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 ini dituangkan ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten/Kota
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Program dan Kegiatan

Bab V PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan atau program yang akan datang. Kualitas renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

**a. Realisasi program/kegiatan yang tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 telah disusun dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tahun 2023 (n-2). Dalam perjalanannya telah dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo baik kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Probolinggo, APBD Provinsi dapat terlaksana meskipun realisasi keuangannya tidak dapat terserap seluruhnya (100%) dikarenakan batas waktu yang diterapkan terlalu sempit dan tidak ada kepastian pelaksanaan fisik bila nanti sudah diadakan penyusunan DED.

Untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten semua dapat terlaksana dengan baik, namun terdapat beberapa efisiensi penggunaan anggaran melalui pengadaan barang jasa (kontrak-kontrak dengan pihak penyedia swasta). Untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo hanya bertindak sebagai pelaksana/penerima bantuan dari kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dicapai melalui :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO;**
   - Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah (**95,73**%)
   - Administrasi Keuangan Perangkat daerah (**95,90**%)
   - Administrasi pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (**100**%)
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah (**0**%)
   - Administrasi Umum Perangkat daerah (**93,63**%)
   - Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah (**95,53**%)
   - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah (**86,47**%)
2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ( LLAJ);**
   - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (**99,69**%)
   - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota (**93,04**%)
   - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (**88,65**%)
   - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (**92,96**%)
   - Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (**98,91**%)
   - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (**99,46**%)
   - Penyediaan angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (**99,40**%)
   - Penerbitan izin Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu ) Daerah Kabupaten/Kota (**98,35**%)
3. **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN;**
   - Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Dalam Daerah Kabupaten / Kota yang Terletak pada jaringan jalan Kabupaten /Kota dan / atau Jaringan Jalur Kereta api Kabupaten/Kota (**95,11**%)

Nilai capaian Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo secara umum sebesar Rp 32.044.969.326,- dari nilai anggaran sebesar Rp 33.786.465.270,- sehingga nilai capaian sebesar 94,85% dari hasil capaian tersebut, tentunya tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo serta dukungan dan kerja sama dengan pihak – pihak terkait dengan memberi kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga nantinya penyerapan anggaran maupun capaian kinerja akan lebih maksimal.

**Tabel 2 1 Nilai Capaian Program Tahun 2024**

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO | 27.377.652.599,- | 26.133.048.793,- | 95,45 |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ( LLAJ) | 6.383.277.671,- | 5.884.103.445,- | 92,18 |
| 3. | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 25.535.000,- | 24.286.300,- | 95,11 |

**b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Berbagai penyebab tidak terpenuhinya target kegiatan Dinas Perhubungan adalah :

- **Faktor Internal**
  - Adanya Penyesuaian Kebijakan dan Prioritas Anggaran dari Pusat ke Daerah.
  - Minimnya Koordinasi internal antar bidang/sub bidang.
  - Jumlah dan kompetensi pegawai yang terbatas, khususnya tenaga teknis perhubungan.
  - Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa urusan perhubungan.
- **Faktor Eksternal**

- Kebijakan Pemerintah Pusat yang berubah sewaktu-waktu.
- Penolakan masyarakat terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas, pengalihan jalur, atau pengaturan parkir.
- Penurunan aktivitas transportasi akibat ketidakstabilan perekonomian lokal.
- Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam program-program edukasi atau sosialisasi keselamatan transportasi.

**c. Implikasi yang timbul terhadap terget capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi dan manfaat yang timbul dari pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo diantaranya yaitu meningkatnya capaian layanan transportasi, semakin tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, semakin meningkatnya komitmen Pemerintah dan kesadaran Masyarakat dalam mendukung tertib lalu lintas.

**d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Untuk keberhasilan pencapaian program dapat dilakukan seperti :

- Pengusulan anggaran ke pemerintah Provinsi dan Pusat agar mendapat tambahan anggaran baik secara regular maupun bantuan keuangan.
- Mencari alternatif pembiayaan pada sektor transportasi di luar APBD maupun APBN.
- Sharing kegiatan antar stakeholder dan dinas terkait sebagai penunjang kegiatan yang menitikberatkan di bidang transportasi.
- peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas dengan cara melakukan pelatihan/diklat/pendidikan agar terampil dalam melaksanakan tugas demi lancarnya program yang telah direncanakan.

Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2024 Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada Tabel T.C 29

**Tabel T.C 29**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Probolinggo**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Tabel 2 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ** | **- Persentase penyelenggaraan jalan yang sudah memenuhi standar berkeselamatan**<br>**- Persentase angkutan umum yang sudah memenuhi standar keselamatan** | **- 84%**<br>**- 62%** | | **35%**<br>**57%** | **12,90**<br>**98,77** | **36,86%**<br>**173,28%** | **36%**<br>**60%** | | |
| | **Keg. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen rencana induk jaringan LLAJ yang ditetapkan** | **1 dokumen** | | **1 dokumen** | **0** | **0** | **1 dokumen** | | |
| | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 dokumen | | 1 dokumen | 0 | 0 | 1 dokumen | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | **Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **Jumlah Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten** | **200 unit** | | **150 unit** | **154 unit** | **108%** | **745 unit** | | |
| | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 450 unit | | 50 | 54 | 108% | 400 unit | 0 unit | |
| | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 250 unit | | 100 | 100 | 100 | 345 unit | 0 unit | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 100 unit | | 100 | 100 | 100 | 50 unit | 0 unit | |
| | **Keg. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **Jumlah titik lokasi parkir yang dikelola** | **41 titik** | | **41 titik** | **41 titik** | **100** | **41 titik** | **41 titik** | 100 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 laporan | | 12 laporan | 12 laporan | 100 | 12 lap | 6 lap | 50 |
| | **Keg. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Jumlah kendaraan yang lulus pengujian berkala** | **9010 unit** | | **7000 unit** | **6158 unit** | **87,97%** | **8000 unit** | **2636 unit** | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 20 unit | | 20 unit | 20 unit | 100 | 20 unit | 20 unit | 100 |
| | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 9010 dok | | 7000 unit | 6158 unit | 87,97 | 8000 unit | 2636 unit | |
| | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor yang Terpelihara | 20 unit | | 20 unit | 20 unit | 100 | 20 unit | 20 unit | 100 |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 12 lap | | 12 lap | 12 lap | 100 | 12 lap | 6 lap | 50 |
| | **Keg Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu l.intas untuk jaringan jalan Kab/Kota** | **12 lap** | | **12 lap** | **12 lap** | **100** | **12 lap** | **6 lap** | 50 |
| | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 12 lap | | 12 lap | 12 lap | 100 | 12 lap | 6 lap | 50 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 12 lap | | 12 lap | 12 lap | 100 | 12 lap | 6 lap | 50 |
| | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 12 lap | | 12 lap | 12 lap | 100 | 12 lap | 6 lap | 50 |
| | **Keg Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang Dilaksanakan** | **12 lap** | | **12 lap** | **12 lap** | **100** | **12 lap** | **6 lap** | 50 |
| | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 12 lap | | 12 lap | 12 lap | 100 | 12 lap | 6 lap | 50 |
| | **Keg Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **50 unit** | | **41 unit** | **41 unit** | **100** | **41 unit** | **41 unit** | 73,21 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang | 4 lap | | 4 lap | 4 lap | 100 | 4 lap | 2 lap | 50 |
| | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 56 unit | | 41 unit | 41 unit | 100 | 41 unit | 41 unit | 73,21 |
| | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah izin penyelenggaraan angkutan orang yang diterbitkan** | **12 ijin** | | **3 ijin** | **0** | **0** | **12 ijin** | **0 ijin** | 0 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan | 12 lap | | 12 | 12 | 100 | 12 lap | 6 lap | 50 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12 lap | | 12 | 12 | 100 | 12 lap | 6 lap | 50 |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **PERSENTASE PEMBINAAN PELAYARAN YANG DILAKSANAKAN DAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN** | **2%** | | **2%** | **1,95%** | **97,50** | **2%** | **0 %** | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | **Keg. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota** | **Jumlah pembinaan pelayaran yang dilaksanakan dan perizinan yang diterbitkan** | 6 lap | | **55** | **55** | | 6 lap | 6 lap | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | 6 lap | | 1 lap | 1 lap | | 4 lap | 2 lap | 50 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Kemaikan Nilai LHE AKIP PD** | **1%** | | 1% | 1,60% | 160 | **1%** | **%** | |
| | **Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daeah** | **20 dok** | | **19 dok** | **19 dok** | 100 | **20 dok** | **8 dok** | 40 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 dok | | 5 dok | 5 dok | 100 | 9 dok | 1 dok | 11,11 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | | 1 dok | 1 dok | 100 | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dok | | 1 dok | 1 dok | 100 | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dok | | 1 dok | 1 dok | 100 | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dok | | 1 dok | 1 dok | 100 | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 lap | | 11 lap | 11 lap | 100 | 11 lap | 7 lap | 63,64 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | **Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikerjakan** | **13 dok** | | **100** | **100** | 100 | **13 dok** | **6 dok** | 50 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 67 Orang/bulan | | 65 Orang/bulan | 65 Orang/bulan | 100 | 65 Orang/bulan | 65 Orang/bulan | 100 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 lap | | 1 lap | 1 lap | 100 | 1 lap | 0 lap | 0 |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 dok | | 2 dok | 2 dok | 100 | 2 dok | 1 dok | 50 |
| | **Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **6dok** | | **6 dok** | **6 dok** | 100 | **6 dok** | **3 dok** | 50 |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 dok | | 2 dok | 2 dok | 100 | 2 dok | 1 dok | 50 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 dok | | 4 dok | 4 dok | 100 | 4 dok | 2 dok | 50 |
| | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang dikerjakan** | **12 dok** | | **12 dok** | **12 dok** | 100 | **12 dok** | **6 dok** | 50 |
| | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 lap | | 12 lap | 12 lap | 100 | 12 lap | 6 lap | 50 |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang di kerjakan** | **12 dok** | | **12 dok** | **12 dok** | 100 | **12 dok** | **6 dok** | 50 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 220 paket | | 220 paket | 0 paket | 0 | 150 paket | 0 paket | 68,18 |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 dok | | 12 dok | 12 dok | 100 | 12 dok | **6 dok** | 50 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 26 orang | | 1 orang | 1 orang | 100 | 0orang | 0 orang | 0 |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dikerjakan** | **12 dok** | | **12 dok** | **12 dok** | 100 | **12 dok** | **6 dok** | 50 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 paket | | 12 paket | 12 paket | 100 | 12 paket | 6 paket | 50 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 paket | | 12 paket | 12 paket | 100 | 12 paket | 6 paket | 50 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 paket | | 12 paket | 12 paket | 100 | 12 paket | 6 paket | 50 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 paket | | 12 paket | 12 paket | 100 | 12 paket | 6 paket | 50 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 paket | | 12 paket | 12 paket | 100 | 12 paket | 6 paket | 50 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | | 12 laporan | 12 laporan | 100 | 12 laporan | 6 laporan | 50 |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah** | **32 unit** | | **0** | **0** | 0 | **32 unit** | **0 unit** | 0 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | 1 unit | | 0 | 0 | 0 | 2 unit | 0 unit | 0 |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 13 unit | | 0 | 0 | 0 | 13 unit | 0 unit | 0 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 17 unit | | 0 | 0 | 0 | 17 unit | 0 unit | 0 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah yang di laporkan** | **12 lap** | | **12 lap** | **12 lap** | 100 | **12 lap** | **6 lap** | 50 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 lap | | 12 lap | 12 lap | 100 | 12 lap | 6 lap | 50 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 lap | | 12 lap | 12 lap | 100 | 12 lap | 6 lap | 50 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 lap | | 12 lap | 12 lap | 100 | 12 lap | 6 lap | 50 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 lap | | 12 lap | 12 lap | 100 | 12 lap | 6 lap | 50 |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Barang Milk daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terpelihara dengan baik** | **94 unit** | | **94 unit** | **94 unit** | 100 | **94 unit** | **94 unit** | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 38 unit | | 38 unit | 38 unit | 100 | 38 unit | 38 unit | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 unit | | 5 unit | 5 unit | 100 | 5 unit | 5 unit | 100 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 unit | | 50 unit | 50 unit | 100 | 50 unit | 50 unit | 100 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan visi, misi Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, maka sasarannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, maka sasarannya adalah meningkatkan keselamatan, keamanan dan ketertiban transportasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T.C 30 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

**Tabel T.C 30**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

**Kabupaten Probolinggo**

Tabel 2 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2023 (thn n-2) | Tahun 2024 (thn n-1) | Tahun 2025 (thn n) | Tahun 2027 (thn n+1) | Tahun 2023 (thn n-2) | Tahun 2024 (thn n-1) | Tahun 2025 (thn n) | Tahun 2026 (thn n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Rasio konektivitas kabupaten/kota | | √ | | | | 0,72 | 0 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |
| 2 | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota | | √ | | | | 0,21 | 0,37 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |

## 2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan dengan fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan dan keselamatan transportasi, prasarana transportasi, UPT dan kelompok jabatan fungsional;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan dan keselamatan transportasi, prasarana transportasi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan lalu

lintas dan angkutan jalan, pengembangan dan keselamatan transportasi, prasarana transportasi, UPT dan kelompok jabatan fungsional;

d. pelaksanaan administrasi dibidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan dan keselamatan transportasi, prasarana transportasi, UPT dan kelompok jabatan fungsional;
e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan seluruh kebijakan kegiatan baik lintas program maupun lintas sektoral;
f. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat serta informasi dibidang perhubungan;
g. penetapan keputusan dan penerbitan perizinan sesuai dengan kewenangan;
h. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

a. Kurangnya SDM berlatar belakang teknis perhubungan;
b. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi;
c. Sistem dan jaringan transportasi intermoda/multimoda belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan tidak efesiennya dan efektifnya mobilitas penduduk;
d. Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas;
e. Pengembangan transportasi darat dan laut yang aman, tertib, terintegrasi dan terjangkau;
f. Menurunnya angka kecelakaan dan gangguan keamanan dalam pelayanan transportasi;
g. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan transportasi;
h. Pengembangan sistem pelayanan yang efesien dengan pelayanan prima.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan dihadapkan pada beberapa permasalahan dan hambatan, yaitu:

- Kepadatan lalu lintas sering menyebabkan kemacetan, waktu perjalanan yang lama, dan meningkatkan polusi udara.

- Kualitas jalan yang buruk, termasuk jalan berlubang, permukaan jalan yang tidak rata, dan kondisi jembatan yang memburuk serta Perlengkapan Jalan yang kurang memadai
- Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan cedera.
- Kurangnya aksesibilitas transportasi umum di daerah pedesaan atau pinggiran kota.
- Polusi udara, polusi suara, dan dampak lingkungan lainnya akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- Kurangnya perencanaan yang efektif dan manajemen yang baik dalam pengembangan sistem transportasi.
- Layanan angkutan umum yang tidak memadai, seperti keterlambatan, keamanan dan kenyamanan yang rendah.
- Peningkatan Penggunaan Tekhnologi dalam Transportasi yang tidak diimbangi adaptasi masyarakat sehingga banyak layanan transportasi tidak berkembang.

Dampak dari permasalahan tersebut mempengaruhi pencapaian program kegiatan kedinasan diantaranya yaitu berupa;

1. Cakupan layanan transportasi yang belum maksimal
2. Wilayah yang terkoneksi transportasi publik belum semua terkoneksi
3. Kurang efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo memperlihatkan tantangan dan peluang sebagai berikut:

- **Tantangan**
  a. Perkembangan teknologi yang dinamis sehingga perlu peranan dinas perhubungan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan sistem yang ada agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya.
  b. Kebutuhan masyarakat yang terus berubah mempengaruhi permintaan terhadap layanan transportasi dan infrastruktur.
  c. Persaingan dengan sektor swasta dalam hal penyediaan layanan transportasi, seperti transportasi online dan operator angkutan umum.
  d. Kondisi ekonomi yang fluktuatif dapat mempengaruhi alokasi anggaran dan permintaan terhadap layanan transportasi.
  e. Kewajiban untuk memenuhi standar lingkungan yang tinggi dan mengurangi dampak negatif lingkungan dari kegiatan transportasi.

f. Perubahan dalam struktur demografis, seperti pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, mempengaruhi permintaan terhadap infrastruktur transportasi.
g. Masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kesulitan akses bagi kelompok marginal.

- **Peluang**
  a. Kemajuan teknologi memberikan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan, dan pengalaman pengguna dalam sistem transportasi.
  b. Pertumbuhan Ekonomi digital membuka kesempatan untuk meningkatkan layanan transportasi melalui platform online dan inovasi digital.
  c. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi menciptakan kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih baik.
  d. Inovasi dalam layanan transportasi umum yang dapat menarik lebih banyak pengguna dan meningkatkan kualitas layanan.
  e. Inisiatif smart city membuka kesempatan untuk mengintegrasikan teknologi dalam sistem transportasi untuk meningkatkan kualitas hidup.
  f. Ketersediaan data besar (big data) dan alat analisis untuk meningkatkan perencanaan dan manajemen transportasi.
  g. Meningkatnya permintaan dari masyarakat untuk solusi transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam menyikapi isu-isu di atas, catatan atau rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo diantaranya yaitu;

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat pada urusan perhubungan.
2. Mencari dan memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur transportasi.
3. Melakukan Manajemen dan rekayasa lalu lintas.
4. Mengadopsi Teknologi Transportasi Cerdas untuk meningkatkan pengelolaan lalu lintas, keselamatan, dan efisiensi sistem transportasi.
5. Membangun dan memperluas infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
6. Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan layanan transportasi dan infrastruktur.

7. Memanfaatkan data besar (big data) untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan sistem transportasi.
8. Mengadakan Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transportasi yang ramah lingkungan.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Review terhadap rancangan awal merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo yang dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan. Disamping itu Dokumen Rencana Kerja juga memuat Program Kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Dengan demikian akan dapat diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Dinas Perhubungan

**Tabel 2 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025**

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kab Probolinggo** | ***Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah*** | **80,17** | **27.443.537.008** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kab Probolinggo** | ***Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah*** | **80,17** | **27.443.537.008** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab Probolinggo** | **Persentase dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daeah sesuai ketentuan dan tepat waktu** | **100%** | **495.000.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab Probolinggo** | **Persentase dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daeah sesuai ketentuan dan tepat waktu** | **100%** | **495.000.000** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab Probolinggo | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 12 Dokumen | 30.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab Probolinggo | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 12 Dokumen | 30.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif (Rp. 000)** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana (Rp. 000)** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 11 Laporan | 35.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 11 Laporan | 35.000.000 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab Probolinggo | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 430.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab Probolinggo | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 430.000.000 | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab Probolinggo** | ***Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan & tepat waktu*** | **100%** | **8.939.888.508** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab Probolinggo** | ***Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan & tepat waktu*** | **100%** | **8.939.888.508** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab Probolinggo | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 65 Orang/bulan | 8.874.888.508 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab Probolinggo | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 65 Orang/bulan | 8.874.888.508 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab Probolinggo | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 35.000.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab Probolinggo | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 35.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab Probolinggo | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 30.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab Probolinggo | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 30.000.000 | |
| | **ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Dokumen Administrasi BMD Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan & tepat waktu** | **100%** | **10.000.000** | **ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Dokumen Administrasi BMD Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan & tepat waktu** | **100%** | **10.000.000** | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab Probolinggo | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | 10.000.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab Probolinggo | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | 10.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Dokumen Administrasi Pendapatan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan & tepat waktu** | **100%** | **20.000.000** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Dokumen Administrasi Pendapatan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan & tepat waktu** | **100%** | **20.000.000** | |
| | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah* | 12 Laporan | 20.000.000 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah* | 12 Laporan | 20.000.000 | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan & tepat waktu** | **100%** | **40.000.000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan & tepat waktu** | **100%** | **40.000.000** | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab Probolinggo | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 185 Paket | 10.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab Probolinggo | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 185 Paket | 10.000.000 | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab Probolinggo | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | 12 Dokumen | 10.000.000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab Probolinggo | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | 12 Dokumen | 10.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab Probolinggo | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 2 Orang | 10.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab Probolinggo | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 2 Orang | 10.000.000 | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Kab Probolinggo | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | 185 Orang | 10.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Kab Probolinggo | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | 185 Orang | 10.000.000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Administasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani** | **100%** | **440.000.000** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Administasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani** | **100%** | **440.000.000** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab Probolinggo | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 20.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab Probolinggo | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 20.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Probolinggo | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | 50.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Probolinggo | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | 50.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab Probolinggo | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | 30.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab Probolinggo | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | 30.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab Probolinggo | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 4 Paket | 40.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab Probolinggo | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 4 Paket | 40.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | 300.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | 300.000.000 | |
| | **PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Kesesuaian Pengadaan BMD dengan RKBMD** | **100%** | **55.000.000** | **PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Kesesuaian Pengadaan BMD dengan RKBMD** | **100%** | **55.000.000** | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Probolinggo | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 unit | 5.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Probolinggo | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 unit | 5.000.000 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Probolinggo | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 20 Unit | 50.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Probolinggo | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 20 Unit | 50.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah** | **100%** | **17.263.648.500** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah** | **100%** | **17.263.648.500** | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab Probolinggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab Probolinggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab Probolinggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.844.448.500 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab Probolinggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.844.448.500 | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab Probolinggo** | **Persentase BMD dalam Kondisi baik** | **75,50%** | **185.000.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab Probolinggo** | **Persentase BMD dalam Kondisi baik** | **75,50%** | **185.000.000** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Probolinggo | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 39 Unit | 150.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Probolinggo | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 39 Unit | 150.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Probolinggo | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 50 Unit | 25.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Probolinggo | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 50 Unit | 25.000.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab Probolinggo | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | 10.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab Probolinggo | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | 10.000.000 | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ** | **Kab Probolinggo** | **1. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (%)** | **13,54** | **2.931.515.504** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ** | **Kab Probolinggo** | **1. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (%)** | **13,54** | **2.931.515.504** | |
| | | | **2. Rasio terjadinya kecelakaan Lalu Lintas Jalan (per jumlah kendaraan) (%)** | **0,09** | | | | **2. Rasio terjadinya kecelakaan Lalu Lintas Jalan (per jumlah kendaraan) (%)** | **0,09** | | |
| | | | **3. Nilai Rata-rata Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Kabupaten (Nilai)** | **0,21** | | | | **3. Nilai Rata-rata Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Kabupaten (Nilai)** | **0,21** | | |
| | | | **4. Rasio Konektivitivitas darat (Nilai Rasio)** | **0,59** | | | | **4. Rasio Konektivitivitas darat (Nilai Rasio)** | **0,59** | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **5. Persentase Angkutan Jalan yang laik jalan (%)** | **90** | | | | **5. Persentase Angkutan Jalan yang laik jalan (%)** | **90** | | |
| | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **Kab Probolinggo** | **Jumlah Laporan Perkembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ** | **1 Laporan** | **10.000.000** | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **Kab Probolinggo** | **Jumlah Laporan Perkembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ** | **1 Laporan** | **10.000.000** | |
| | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota* | 1 Laporan | 10.000.000 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota* | 1 Laporan | 10.000.000 | |
| | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **Kab Probolinggo** | **Persentase pemenuhan perlengkapan jalan sesuai yang direncanakan** | **100%** | **1.180.000.000** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **Kab Probolinggo** | **Persentase pemenuhan perlengkapan jalan sesuai yang direncanakan** | **100%** | **1.180.000.000** | |
| | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun* | 1 unit | 30.000.000 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun* | 1 unit | 30.000.000 | |
| | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | 1077 Unit | 1.000.000.000 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | 1077 Unit | 1.000.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kab Probolinggo | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | 1077 Unit | 150.000.000 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kab Probolinggo | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | 1077 Unit | 150.000.000 | |
| | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Pelayanan Izin Penyelenggaraan & Pembangunan Fasilitas Parkir yang terlayani** | **100%** | **1.111.515.504** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Pelayanan Izin Penyelenggaraan & Pembangunan Fasilitas Parkir yang terlayani** | **100%** | **1.111.515.504** | |
| | | | **Tingkat Realisasi PAD dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum** | **100%** | | | | **Tingkat Realisasi PAD dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum** | **100%** | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota* | 12 Laporan | 1.111.515.504 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota* | 12 Laporan | 1.111.515.504 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Pelayanan Uji Kendaraan bermotor yang terlayani** | **100%** | **350.000.000** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Pelayanan Uji Kendaraan bermotor yang terlayani** | **100%** | **350.000.000** | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kab Probolinggo | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia* | 21 Unit | 40.000.000 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kab Probolinggo | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia* | 21 Unit | 40.000.000 | |
| | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kab Probolinggo | *Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | 5000 Dokumen | 50.000.000 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kab Probolinggo | *Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | 5000 Dokumen | 50.000.000 | |
| | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kab Probolinggo | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara* | 21 Unit | 250.000.000 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kab Probolinggo | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara* | 21 Unit | 250.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | 12 Laporan | 10.000.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | 12 Laporan | 10.000.000 | |
| | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Implementasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Efektif untuk Jaringan Jalan Kabupaten** | **100%** | **210.000.000** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Implementasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Efektif untuk Jaringan Jalan Kabupaten** | **100%** | **210.000.000** | |
| | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota* | 12 Laporan | 30.000.000 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota* | 12 Laporan | 30.000.000 | |
| | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi* | 12 Laporan | 30.000.000 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi* | 12 Laporan | 30.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | 12 Laporan | 150.000.000 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | 12 Laporan | 150.000.000 | |
| | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ sesuai yang direncanakan** | **100%** | **20.000.000** | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ sesuai yang direncanakan** | **100%** | **20.000.000** | |
| | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota* | 2 Laporan | 20.000.000 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota* | 2 Laporan | 20.000.000 | |
| | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab Probolinggo** | **Persentase ketersediaan Angkutan Umum dan atau barang** | **42,11** | **50.000.000** | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab Probolinggo** | **Persentase ketersediaan Angkutan Umum dan atau barang** | **42,11** | **50.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | 4 Laporan | 10.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | 4 Laporan | 10.000.000 | |
| | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia* | 42 Unit | 40.000.000 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia* | 42 Unit | 40.000.000 | |
| | **PROGRAM PERKRETAAPIAN** | **Kab Probolinggo** | **Persentase keselamatan di perlintasan Sebidang Kereta Api Kewenangan Kabupaten** | **100%** | **800.000.000** | **PROGRAM PERKRETAAPIAN** | **Kab Probolinggo** | **Persentase keselamatan di perlintasan Sebidang Kereta Api Kewenangan Kabupaten** | **100%** | **800.000.000** | |
| | **Keg. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian** | **Kab Probolinggo** | **Cakupan Perlintasan Sebidang Kereta Api yang ditangani** | **73,33%** | **800.000.000** | **Keg. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian** | **Kab Probolinggo** | **Cakupan Perlintasan Sebidang Kereta Api yang ditangani** | **73,33%** | **800.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia | 22 unit | 800.000.000 | Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia | 22 unit | 800.000.000 | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **Kab Probolinggo** | **Rasio Konektivitivitas Perairan** | **1 Nilai** | **10.000.000** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **Kab Probolinggo** | **Rasio Konektivitivitas Perairan** | **1 Nilai** | **1.510.000.000** | |
| | **Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab Probolinggo** | **Jumlah Laporan Perkembangan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **1 Laporan** | **10.000.000** | **Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab Probolinggo** | **Jumlah Laporan Perkembangan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **1 Laporan** | **10.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | 1 Laporan | 10.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab Probolinggo | *Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | 1 Laporan | 10.000.000 | |
| | | | | | | **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal** | **Kab Probolinggo** | **Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yg tersedia** | **33,33%** | **1.500.000.000** | |
| | | | | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Kab Probolinggo | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara | 1 Unit | 1.500.000.000 | |
| **TOTAL** | | | | | **31.185.052.512** | | | | | **32.685.052.512** | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan adalah hasil telaah terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi. Pada tabel T-C.32 berisi usulan – usulan aspirasi masyarakat dan pokok pikiran DPRD yang telah dibahas saat desk musrenbang untuk RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 dan diakomodir pada batasan keikutsertaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran.

**Tabel T.C. 32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Probolinggo**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan**

Tabel 2 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| **1** | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | |
| | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Desa Branggah Kec.Lumbang Kab.Probolinggo, Kab. Probolinggo | Jumlah Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten (Pengadaan PJU) | 20 unit | memperhatikan ketersediaan anggaran |
| | | Desa Negororejo, Kec. Lumbang Kab. Probolinggo | Jumlah Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten (Pengadaan PJU) | 5 unit | memperhatikan ketersediaan anggaran |
| | | DESA WONOGORO DUSUN KRJAN RT 001 DAN DUSUN WATURITI RT 06,Kec. Lumbang Kab. Probolinggo | Jumlah Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten (Pengadaan PJU) | 4 unit | memperhatikan ketersediaan anggaran |
| | | Dusun Kedung Pawon RT.01 RW.04 Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, Kab. Probolinggo | Jumlah Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten (Pengadaan PJU) | 21 unit | memperhatikan ketersediaan anggaran |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Permendagri No. 10 Tahun 2025 berisi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Adapun Penyelarasan Kebijakan Daerah dengan Prioritas Nasional sebagai berikut :

| No | Bidang Urusan | Dukungan Asta Cita | Outcame Prioritas | Program | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perhubungan | 1. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.<br>2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau |
| | | | | | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan |

Berikut adalah Fokus Pembangunan bidang Transportasi tingkat Nasional pada beberapa Lokasi yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029. (dengan tetap memperhatikan pencapaian main-outcome dari pelaksanaan kinerja core-business Kementerian Perhubungan di atas), yakni:

1. **Pengembangan transportasi perkotaan.** Khususnya melalui pengembangan sistem angkutan massal perkotaan (berbasis jalan maupun kereta api) dan kegiatan lainnya akan difokuskan pada kota-kota prioritas dalam RPJMN 2025-2029, yakni: 10 kota Metropolitan, 40 kota Non-Metropolitan, pembangunan IKN).

2. **Pengembangan jalur utama logistik nasional akan difokuskan pada:**
   a. Jalur logistik yang mendukung sektor ekonomi utama RPJMN 2025-2029, terutama: ketahanan pangan/energi/air, pengembangan industri kreatif, agromaritim, serta hilirisasi/industri SDA.
   b. Jalur logistik untuk mendukung lokasi pusat pertumbuhan dan pusat ekonomi, terutama: pusat pertumbuhan eksisting, kota baru/IKN, KSPP/Food Estate, SKPT, KI/KEK/KPBPB, Daerah Pariwisata Prioritas dan Regeneratif, IKN/Kota Baru, dll
3. **Pengembangan transportasi kewilayahan dalam meningkatkan pemerataan penyediaan layanan transportasi, yang akan difokuskan pada:**
   1. Dukungan bagi revitalisasi transportasi regional provinsi/kab/kota, termasuk pengembangan transportasi perdesaan.
   2. Dukungan transportasi terhadap daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, kepulauan terpencil dan terluar (DTPK), dan daerah transmigrasi.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan visi Kabupaten Probolinggo yang tertuang pada RPJMD periode tahun 2025-2029 yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO SAE (SEJAHTERA, AMANAH RELIGIUS SERTA EKSIS BERDAYA SAING)”**

sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Probolinggo bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo lebih Sejahtera, Amanah Religius Serta Eksis Berdaya Saing.

Dalam upaya untuk ikut mensukseskan visi Kabupaten Probolinggo tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo mendukung misi ke-4 yaitu **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Di Daerah Basis Produksi, Daerah Terluar, Daerah Terpencil, Serta Perwilayahan Industri Secara Merata (SAE Infrastruktur)”**

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing - masing misi.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah maka Dinas Perhubungan kabupaten probolinggo menetapkan tujuan yaitu Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien, yang diturunkan sasarannya adalah Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan dan konektivitas Transportasi.

**Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien | | Indeks Konektivitas Wilayah (Indeks) | 68,90 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Tata kelola perangkat daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,5 |
| | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan dan konektivitas Transportasi | Persentase Peningkatan PDRB Sektor Transportasi (%) | 12,31 |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## 4.1 Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Probolinggo yang harus diselaraskan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
    - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
        - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
        - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Administrasi keuangan perangkat daerah
        - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
        - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
        - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
    - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
        - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
    - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
        - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
    - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
        - Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
        - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
        - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizianan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pemeliharaan /rehabillitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

**2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

- Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota
  - Pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota
  - Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota
  - Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan

c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
  - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kab/kota
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
- Penyediaan bukti lulus pengujian berkala kendaraan bermotor
- Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
- Koordinasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor

- Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota
  - Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/Kota
  - Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota
  - Forum lalu lintas dan angkutan jalan kab/Kota
- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
  - Pelaksanaan inspeksi audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kab/kota
- Penyediaan Angkutan Umum Jasa Angkutan Orang dan atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah
  - Penyediaan angkutan umum jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 daerah kab/kota
  - Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 daerah Kab/kota

**3. Program Pengelolaan Perkeretaapian**

- **Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**
  - Penyediaan PeraIatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota

**4. Program Pengelolaan Pelayaran**

- Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
  - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
  - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
  - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Perumusan rencana program dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Probolinggo yang harus diselaraskan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 1**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | |
| **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah** | **Kab Probolinggo** | **80,17 Nilai** | **27.443.537.008** | | | **80,53 Nilai** | **27.748.500.000** |
| **2.15.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daeah sesuai ketentuan dan tepat waktu** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **495.000.000** | | | **100%** | **495.000.000** |
| 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab Probolinggo | 12 Dokumen | 30.000.000 | SILPA | | 12 Dokumen | 30.000.000 |
| 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab Probolinggo | 11 Laporan | 35.000.000 | SILPA | | 11 Laporan | 35.000.000 |
| 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab Probolinggo | 1 Laporan | 430.000.000 | SILPA | | 1 Laporan | 430.000.000 |
| **2.15.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan & tepat waktu** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **8.939.888.508** | | | **100%** | **8.965.851.500** |
| 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kab Probolinggo | 65 Orang/bulan | 8.874.888.508 | DAU | | 65 Orang/bulan | 8.900.851.500 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab Probolinggo | 12 Dokumen | 35.000.000 | SILPA | | 12 Dokumen | 35.000.000 |
| 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab Probolinggo | 1 Laporan | 30.000.000 | SILPA | | 1 Laporan | 30.000.000 |
| **2.15.01.2.03** | **ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH** | **Persentase Dokumen Administrasi BMD Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan & tepat waktu** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **10.000.000** | | | **100%** | **10.000.000** |
| 2.15.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab Probolinggo | 6 Laporan | 10.000.000 | SILPA | | 6 Laporan | 10.000.000 |
| **2.15.01.2.04** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen Administrasi Pendapatan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan & tepat waktu** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **20.000.000** | | | **100%** | **20.000.000** |
| 2.15.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kab Probolinggo | 12 Laporan | 20.000.000 | SILPA | | 12 Laporan | 20.000.000 |
| **2.15.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan & tepat waktu** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **40.000.000** | | | **100%** | **120.000.000** |
| 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kab Probolinggo | 185 Paket | 10.000.000 | SILPA | | 185 Paket | 75.000.000 |
| 2.15.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab Probolinggo | 12 Dokumen | 10.000.000 | SILPA | | 12 Dokumen | 10.000.000 |
| 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kab Probolinggo | 2 Orang | 10.000.000 | SILPA | | 2 Orang | 10.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 2.15.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab Probolinggo | 185 Orang | 10.000.000 | SILPA | | 185 Orang | 25.000.000 |
| **2.15.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Administasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **440.000.000** | | | **100%** | **440.000.000** |
| 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab Probolinggo | 4 Paket | 20.000.000 | SILPA | | 4 Paket | 20.000.000 |
| 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab Probolinggo | 4 Paket | 50.000.000 | SILPA | | 4 Paket | 50.000.000 |
| 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kab Probolinggo | 4 Paket | 30.000.000 | SILPA | | 4 Paket | 30.000.000 |
| 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kab Probolinggo | 4 Paket | 40.000.000 | SILPA | | 4 Paket | 40.000.000 |
| 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab Probolinggo | 12 Laporan | 300.000.000 | SILPA | | 12 Laporan | 300.000.000 |
| **2.15.01.2.07** | **PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | **Persentase Kesesuaian Pengadaan BMD dengan RKBMD** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **55.000.000** | | | **100%** | **100.000.000** |
| 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Kab Probolinggo | 1 unit | 5.000.000 | SILPA | | 1 unit | 50.000.000 |
| 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kab Probolinggo | 20 Unit | 50.000.000 | SILPA | | 20 Unit | 50.000.000 |
| **2.15.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **17.263.648.500** | | | **100%** | **17.412.648.500** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab Probolinggo | 12 Laporan | 14.419.200.000 | SILPA | | 12 Laporan | 14.568.200.000 |
| 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab Probolinggo | 12 Laporan | 2.844.448.500 | DBH | | 12 Laporan | 2.844.448.500 |
| **2.15.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase BMD dalam Kondisi baik** | **Kab Probolinggo** | **75,50%** | **185.000.000** | | | **75,50%** | **185.000.000** |
| 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kab Probolinggo | 39 Unit | 150.000.000 | SILPA | | 39 Unit | 150.000.000 |
| 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kab Probolinggo | 50 Unit | 25.000.000 | SILPA | | 50 Unit | 25.000.000 |
| 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab Probolinggo | 1 Unit | 10.000.000 | SILPA | | 1 Unit | 10.000.000 |
| **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ** | **1. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (%)** | **Kab Probolinggo** | **13,23** | **2.931.515.504** | | | **13,54** | **2.964.100.000** |
| | | **2. Rasio terjadinya kecelakaan Lalu Lintas Jalan (per jumlah kendaraan) (%)** | Kab Probolinggo | **0,09** | | | | **0,09** | |
| | | **3. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Nilai)** | **Kab Probolinggo** | **0,21** | | | | **0,21** | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| | | **4. Rasio Konektivitivitas darat (Nilai Rasio)** | Kab Probolinggo | **0,59** | | | | **0,60** | |
| | | **5. Persentase Angkutan Jalan yang laik jalan (%)** | **Kab Probolinggo** | **90** | | | | **90** | |
| **2.15.02.2.01** | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **Jumlah Laporan Perkembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ** | Kab Probolinggo | **1 Laporan** | **10.000.000** | | | **1 Laporan** | **10.000.000** |
| 2.15.02.2.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota* | Kab Probolinggo | 1 Laporan | 10.000.000 | SILPA | | 1 Laporan | 10.000.000 |
| **2.15.02.2.02** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **Persentase pemenuhan perlengkapan jalan sesuai yang direncanakan** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **1.180.000.000** | | | **100%** | **1.180.000.000** |
| 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun* | Kab Probolinggo | 1 unit | 30.000.000 | Opsen PKB | | 1 unit | 30.000.000 |
| 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | Kab Probolinggo | 1077 Unit | 1.000.000.000 | Opsen PKB | | 1077 Unit | 1.000.000.000 |
| 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | Kab Probolinggo | 1077 Unit | 150.000.000 | SILPA | | 1077 Unit | 150.000.000 |
| **2.15.02.2.03** | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | ***Jumlah Terminal Type C yang dikelola*** | **Kab Probolinggo** | **0 Unit** | **0** | | | **0 Unit** | **0** |
| 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | *Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara* | Kab Probolinggo | 0 Unit | 0 | | | 0 Unit | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| **2.15.02.2.04** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **Persentase Pelayanan Izin Penyelenggaraan & Pembangunan Fasilitas Parkir yang terlayani** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **1.111.515.504** | | | **100%** | **1.144.100.000** |
| | | **Tingkat Realisasi PAD dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum** | | **100%** | | | | **100%** | |
| 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota* | Kab Probolinggo | 12 Laporan | 1.111.515.504 | Opsen PKB | | 12 Laporan | 1.144.100.000 |
| **2.15.02.2.05** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Persentase Pelayanan Uji Kendaraan bermotor yang terlayani** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **350.000.000** | | | **100%** | **350.000.000** |
| 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia* | Kab Probolinggo | 21 Unit | 40.000.000 | Opsen PKB | | 21 Unit | 40.000.000 |
| 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | Kab Probolinggo | 5000 Dokumen | 50.000.000 | Opsen PKB | | 5000 Dokumen | 50.000.000 |
| 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara* | Kab Probolinggo | 21 Unit | 250.000.000 | Opsen PKB | | 21 Unit | 250.000.000 |
| 2.15.02.2.05.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | Kab Probolinggo | 12 Laporan | 10.000.000 | Opsen PKB | | 12 Laporan | 10.000.000 |
| **2.15.02.2.06** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **Persentase Implementasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Efektif untuk Jaringan Jalan Kabupaten** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **210.000.000** | | | **100%** | **210.000.000** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota* | Kab Probolinggo | 12 Laporan | 30.000.000 | SILPA | | 12 Laporan | 30.000.000 |
| 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi* | Kab Probolinggo | 12 Laporan | 30.000.000 | SILPA | | 12 Laporan | 30.000.000 |
| 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | Kab Probolinggo | 12 Laporan | 150.000.000 | SILPA | | 12 Laporan | 150.000.000 |
| **2.15.02.2.08** | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ sesuai yang direncanakan** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **20.000.000** | | | **100%** | **20.000.000** |
| 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota* | Kab Probolinggo | 2 Laporan | 20.000.000 | Opsen PKB | | 2 Laporan | 20.000.000 |
| **2.15.02.2.09** | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase ketersediaan Angkutan Umum dan atau barang** | **Kab Probolinggo** | **42,11** | **50.000.000** | | | **47,37** | **50.000.000** |
| 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | Kab Probolinggo | 4 Laporan | 10.000.000 | SILPA | | 4 Laporan | 10.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia* | Kab Probolinggo | 42 Unit | 40.000.000 | SILPA | | 42 Unit | 40.000.000 |
| **2.15.05** | **PROGRAM PERKRETAAPIAN** | **Persentase keselamatan di perlintasan Sebidang Kereta Api Kewenangan Kabupaten** | **Kab Probolinggo** | **100%** | **800.000.000** | | | **100%** | **808.900.000** |
| **2.15.05.2.01** | **Keg. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian** | **Cakupan Perlintasan Sebidang Kereta Api yang ditangani** | **Kab Probolinggo** | **73,33%** | **800.000.000** | | | **80,%** | **808.900.000** |
| 2.15.05.2.01.0004 | Penyediaan PeraIatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia | Kab Probolinggo | 22 unit | 800.000.000 | Opsen PKB | | 22 unit | 808.900.000 |
| **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **Rasio Konektivitivitas Perairan** | **Kab Probolinggo** | **1 Nilai** | **1.510.000.000** | | | **1 Nilai** | **1.526.800.000** |
| **2.15.03.2.07** | **Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Laporan Perkembangan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab Probolinggo** | **1 Laporan** | **10.000.000** | | | **1 Laporan** | **10.000.000** |
| 2.15.03.2.07.0004 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan | *Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan* | Kab Probolinggo | 1 Laporan | 10.000.000 | SILPA | | 1 Laporan | 10.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| | Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | |
| **2.15.03.2.12** | **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal** | **Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yg tersedia** | **Kab Probolinggo** | **33,33%** | **1.500.000.000** | | | **33,33%** | **1.516.800.000** |
| 2.15.03.2.12.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara | Kab Probolinggo | 1 Unit | 1.500.000.000 | BK Prov | | 1 Unit | 1.516.800.000 |
| **2.15.03.2.13** | **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau** | **Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara** | **Kab Probolinggo** | **0 unit** | **0** | | | **0 unit** | **0** |
| 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | Kab Probolinggo | 0 unit | 0 | | | 0 unit | 0 |
| 2.15.03.2.13.0011 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia | Kab Probolinggo | 0 unit | 0 | | | 0 unit | 0 |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo merupakan dokumen perencanaan tahunan dan sebagai penjabaran Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo yang memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalanpersoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo dan sebagai pedoman seluruh personil Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan VISI dan MISI yang telah menjadi komitmen bersama.

## 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

a. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kab prob Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan/ Sub Kegiatan satu tahun kedepan. Dimana antar kegiatan dalam satu program harus ada keterpaduan dan sinkronisasi satu sama lain, begitu juga dalam satu kegiatan harus ada sinkronisasi antara sub kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit pelaksana.
b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun 2026 maupun perkiraan maju tahun 2027.
c. Penyusunan Renja Dinas PerhubunganKab.prob bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan

dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

### 5.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

a. Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Guna peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
c. Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Guna optimalisasi layanan perhubungan selain rencana tindak lanjut pada tabel diatas, Dinas perhubungan juga mengambil beberapa Langkah sebagai berikut:

a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi vertical pada Forum Perangkat Daerah, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi dan ketepatan sasaran kegiatan akan terwujud.
c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kab.Prob. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui Pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana

Probolinggo, September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**EDY SURYANTO,S.Sos,M.Si**
NIP. 19700108 199602 1 001

# RENCANA KERJA (RENJA)
# TAHUN 2026

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIKDAN PERSANDIAN**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga “Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026” telah dapat diselesaikan penyusunannya.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2026 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Probolinggo, Juli 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**ULFININGTYAS, SH, MM**
Pembina Tingkat I
NIP. 196811291996022002

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR ISI..... i**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 45

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 47

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 51

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku.. Kepentingan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo..... 74

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 77**

**3.1** Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 77

**3.2** Tujuan dan Sasaran Renja OPD ..... 81

**3.3** Program dan Kegiatan..... 81

**BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 102**

**BAB V PENUTUP .....105**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renja memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Review Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

Penyusunan Renja 2026 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016 no 1 seri D).
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
30. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo tahun 2010-2029;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 – 2029;
35. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Berita daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 68 Seri G1);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo 2026 yaitu: untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, yaitu:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pengawasan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;

2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;

4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo tahun lalu (2025), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2026), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat kajian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo, serta program dan kegiatan.

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

**BAB V. PENUTUP**

Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

### a. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 telah disusun dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Dalam perjalanannya telah dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan tahun 2025 (per Bulan Juni) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo dapat terlaksana dengan baik meskipun realisasi keuangannya dapat terserap sebesar ( 32,34% ) dikarenakan penyerapannnya tidak sesuai dengan anggaran kas, adanya himbauan dari OPD yang berkopenten.

Adapun penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan dalam tahun anggaran 2025 dapat kami tampilkan dalam tabel sebagai berikut

**Tabel 2.1**

**Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025**

**(Per Juni 2025)**

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | 5.988.460.873 | 2.837.554.349 | 47,38 % |
| 2. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | 1.191.500.000 | 252.746.398 | 21,21 % |
| 3. | Program Aplikasi Informatika | 4.464.260.871 | 702.047.590 | 15,73% |
| 4. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 107.916.950 | 17.853.650 | 16,54 % |
| 5. | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 32.080.000 | 792.500 | 2,47 % |

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (47,38%)**

   - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (4,15%)
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (49,39%)
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6,67%)
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah (42,88%)
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (95,50%)
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (44,52%)
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (24,82%)

2. **Program Informasi dan Komunikasi Publik (21,21%)**

   - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (21,21%)

3. **Program Aplikasi Informatika (15,73%)**

   - Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (0,00%)
   - Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (15,73 %)

4. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (16,54%)**

   - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (16,54%)

5. **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (2,47%)**

   - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (16,24% )
   - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (0,00%)

Nilai capaian program kegiatan tahun 2025 sampai bulan Juni pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo secara umum sebesar ***Rp* 3,810,994,487** dari nilai anggaran sebesar ***Rp* 11,784,218,694** sehingga nilai capaian sebesar ***32,34 %.*** Dari hasil capaian tersebut, tentunya tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo serta dukungan dan kerja sama dengan pihak – pihak terkait dengan memberi kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga nantinya penyerapan anggaran maupun capaian kinerja akan lebih maksimal.

**b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Berbagai penyebab tidak terpenuhinya target kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian paling utama dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan prioritas anggaran pada beberapa Perangkat Daerah**.** Kondisi ini mengakibatkan alokasi anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menjadi terbatas. Selain itu, faktor lain seperti pergeseran dan refocusing anggaran**,** serta tertundanya realisasi akibat proses administrasi pembayaran pihak ketiga (vendor/penyedia jasa) juga turut memengaruhi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan.

**c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Untuk keberhasilan pencapaian program dapat dilakukan seperti pengusulan anggaran ke pemerintah agar berharap mendapat kucuran dana tambahan ke daftar anggaran perangkat daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo sendiri. Sharing kegiatan antar stakeholder dan dinas terkait sebagai penunjang kegiatan yang menitikberatkan di bidang jaringan internet. Selain kebijakan anggaran juga harus diperhatikan untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas dengan cara melakukan pelatihan/diklat/pendidikan agar terampil dalam melaksanakan tugas demi lancarnya program yang

telah direncanakan.

Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian s/d Tahun 2025 Kabupaten Probolinggo. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2025 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2025. Target dan Realisasi dapat dilihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut :

**Tabel T-C.29**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 *( Per Juni 2025 )***

**Kabupaten Probolinggo**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LHE AKIP PD** | **82** | **77,76** | **81** | **77,91** | **96%** | **81** | **236,67** | **2,89** |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen tersusun tepat waktu** | **11 Dokumen** | **11 Dokumen** | **11 Dokumen** | **11 Dokumen** | **100%** | **11 Dokumen** | **33 Dokumen** | **3** |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 3 Dokumen | 8 Dokumen | 2,67 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 3 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 3 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 3 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 3 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 4 Laporan | 6 Laporan | 6 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | 2 Laporan | 8 Laporan | 2,67 |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Prosentase dokumen penatausahaan keuangan yang disusun, prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu** | **95 %** | **90 %** | **95 %** | **95 %** | **100%** | **96%** | **96%** | **1,01** |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 28 Orang/bulan | 28 Orang/bulan | 100% | 32 Orang/bulan | 85 Orang/bulan | 3,4 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 0 | 2 Dokumen | 2 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 3 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | 4 Laporan | 10 Laporan | 3,33 |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 2 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 36 Laporan | 3 |
| | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Prosentase objek retribusi daerah yang membayar retribusi** | **100%** | **100%** | - | - | | 0 | 100% | 1 |
| | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | - | - | | 0 | 3 Laporan | 1 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 3 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | 0 | 2 Dokumen | 0,67 |
| | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | - | - | - | 0 | 1 Laporan | 1 |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Prosentase pelaksanaan administrasi kepegagawaian tepat waktu** | **85%** | **83%** | **85 %** | **85 %** | **100%** | **85%** | **253%** | **2,98** |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 4 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 5 Orang | - | - | - | 3 Orang | 8 Orang | 1,6 |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase administrasi umum perangkat daerah** | **90%** | **86%** | **90 %** | **90 %** | **100%** | **91%** | **267%** | **2,97** |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 5 Paket | 7 Paket | 7 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 2 Paket | 4 Paket | 4 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 2 Paket | 2 Paket | 2 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1 Paket | 3 Paket | 3 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Paket | 1 Paket | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 12 Laporan | 14 Laporan | 14 |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Prosentase barang milik daerah tepat waktu** | **90%** | **90%** | **90 %** | **90 %** | **100%** | **91%** | **189%** | **2,1** |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 3 Unit | 3 Unit | 100% | 8 Unit | 11 Unit | 0,92 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Prosentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **90 %** | **90 %** | **90 %** | **90 %** | **100%** | **91%** | **271%** | **3,01** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 36 Laporan | 3 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 36 Laporan | 3 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 36 Laporan | 3 |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Prosentase barang milik daerah kondisi baik** | **85%** | **81%** | **85 %** | **85 %** | **100%** | **86%** | **252%** | **2,96** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 100% | 13 Unit | 33 Unit | 3,3 |
| | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 20 Unit | 15 Unit | 15 Unit | 100% | 20 Unit | 55 Unit | 2,75 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Sarana | 3 Sarana | 3 Unit | 3 Unit | 100% | 3 Unit | 6 Unit | 2 |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Prosentase Peningkatan Lembaga yang mendapatkan layanan Informasi dan komunikasi publik** | **-** | **-** | **50 Persen** | **50 Persen** | **100%** | | **50 Persen** | **0** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | **Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi** | **95%** | **95%** | - | - | - | - | **95%** | **1** |
| | | **Prosentase Peningkatan Lembaga yang mendapatkan layanan Informasi dan komunikasi publik** | - | - | - | - | - | **50%** | **50%** | **0** |
| | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Lembaga Yang Mendapat Layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik** | - | - | **10 Lembaga** | **10 Lembaga** | **100%** | **14 Lembaga** | **34 Lembaga** | **0** |
| | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | 2 Dokumen | 2 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | 2 Dokumen | 2 |
| | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 400 Dokumen | 400 Dokumen | 800 Dokumen | 800 Dokumen | 100% | - | 1200 Dokumen | 3 |
| | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | - | 24 Dokumen | 2 |
| | | Jumlah Penyampaian Informasi Melalui Radio Bromo FM | 12 Bulan | 12 Bulan | - | - | - | - | 12 Bulan | 1 |
| | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 100% | - | 28 Dokumen | 2 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | 121 Layanan | 121 Layanan | 94 Layanan | 94 Layanan | 100% | - | 215 Layanan | 1,78 |
| | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | 2 Dokumen | 2 |
| | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | 1 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 100% | - | 7 Unit | 7 |
| | | Jumlah Penyampaian Informasi Publik melalui Media Luar Ruangan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | - | 12 Bulan | 1 |
| | | Desain Logo Harjakapro | 1 Paket | 1 Paket | - | - | - | - | 1 Paket | 1 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | - | - | - | - | - | 130 Laporan | 130 Laporan | 0 |
| | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | - | - | - | - | - | 10 Komunitas | 10 Komunitas | 10 |
| | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | - | - | - | - | - | 1 Permohonan | 1 Permohonan | 1 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | - | - | - | - | - | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 1 |
| | Diseminasi Informasi | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik | - | - | - | - | - | 90 Persentase | 90 Persentase | 90 |
| | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | - | - | - | - | - | 12 Media | 12 Media | 12 |
| | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Indeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE** | **3 Indeks** | **3 Indeks** | - | - | - | **3 Indeks** | | **0** |
| | | **Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi** | **2,80 Indeks** | **2,80 Indeks** | - | - | - | **2,80 Indeks** | | **0** |
| | | **Prosentase Pemanfaatan Website OPD, Kecamatan dan Desa** | **85%** | **85%** | - | - | - | **85%** | | **0** |
| | | **Prosentase OPD yang mengimplementasikan layanan berbasis elektronik** | - | - | **60 Persen** | **60 Persen** | **100%** | **60 Persen** | **180 Persen** | **0** |
| | | **Jumlah OPD yang memanfaatkan layanan berbasis elektronik** | - | - | **60 Persen** | **60 Persen** | **100%** | **60 Persen** | **180 Persen** | **0** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah OPD yang mengimplementasikan penunjang layanan berbasis elektronik** | - | - | **25 OPD** | **25 OPD** | **100%** | **25 OPD** | **75 OPD** | **0** |
| | | **Prosentase OPD yang Terkoneksi Melalui Jaringan Intra Pemerintah** | **85%** | **85%** | - | - | - | - | **85%** | **1** |
| | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Domain | 1 Domain | - | - | - | - | 1 Domain | 1 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | 2 Dokumen | 2 |
| | | Terlaksananya Rakor Pengawasan Domain dan Sub Domain | 1 Kali | 1 Kali | - | - | - | - | 1 Kali | 1 |
| | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 100% | | 40 Unit | 2 |
| | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Terselenggaranya Evaluasi SPBE** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | - | - | - | - | - | **0** |
| | | **Jumlah layanan E-Goverment yang terkelola dengan baik** | - | - | **7 Layanan** | **7 Layanan** | **100%** | **15 Layanan** | **15 Layanan** | **0** |
| | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | - | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | - | 0 |
| | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100% | - | - | 0 |
| | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | - | 0 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | - | - | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 3 PD | 3 PD | 2 PD | 2 PD | 100% | - | - | 0 |
| | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 3 Unit | 3 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 100% | - | - | 0 |
| | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | - | - | 0 |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | - | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | - | 0 |
| | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | - | 0 |
| | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional | - | - | - | - | - | 10 Aplikasi | 10 Aplikasi | 0 |
| | Koordinasi penyusunan proses bisnis | Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 |
| | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | - | - | - | - | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 |
| | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 |
| | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 |
| | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | - | - | - | - | - | 6 Aplikasi | 6 Aplikasi | 0 |
| | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | - | - | - | - | - | Aplikasi | Aplikasi | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah | - | - | - | - | - | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0 |
| | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | - | - | - | - | - | 29 PD | 29 PD | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | - | - | - | - | - | 2 Layanan | 2 Layanan | 0 |
| | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 |
| | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas | - | - | - | - | - | 2 Program | 2 Program | 0 |
| | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan | - | - | - | - | - | 7 Aplikasi | 7 Aplikasi | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | - | - | - | - | - | 29 PD | 29 PD | 0 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | - | - | - | - | - | | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Penerapan Management SPBE** | **2,50 Indeks** | **2,50 Indeks** | - | - | - | - | - | **0** |
| | | **Prosentase terpenuhinya data statistik sektoral** | | | **95 Persen** | **95 Persen** | **100%** | **95 Persen** | **95 Persen** | **0** |
| | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi** | **90%** | **90%** | - | - | - | - | - | **0** |
| | | **Jumlah OPD Yang Telah Mengelola Data Statistik Sektoral** | | | **25 opd** | **25 opd** | **100%** | **25 opd** | **25 opd** | **0** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | - | 0 |
| | | Jumlah Rapat Koordinasi | 7 Kali | 7 Kali | | | | - | - | 0 |
| | | Jumlah Sosialisasi | 2 Kali | 2 Kali | | | | - | - | 0 |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 50 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 100% | - | - | 0 |
| | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | - | 0 |
| | | Jumlah Sosialisasi | 1 Kali | 1 Kali | | | | - | - | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | - | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 0 |
| | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | - | - | - | - | - | 80 Persentase | 80 Persentase | 0 |
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | - | - | - | - | - | | | **0** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Indeks Aspek Audit TIK** | **1 Indeks** | **1 Indeks** | - | - | - | - | - | **0** |
| | | **Prosentase Layanan berbasis elektronik pemerintah daerah Yang Diamankan** | - | - | **95 Persen** | **95 Persen** | **100%** | **95 Persen** | **95 Persen** | **0** |
| | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Keamanan Informasi yang Diamankan** | **9 Kali** | **8 Kali** | - | - | - | - | - | 0 |
| | | **Jumlah layanan berbasis lektronik pemerintah daerah yang diamankan** | - | - | **3 Layanan** | **3 Layanan** | **100%** | **3 Layanan** | **3 Layanan** | **0** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 3 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,25 |
| | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 |
| | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah** | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **12 OPD** | **12 OPD** | **100%** | **50%** | **50%** | **4,17** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) ( 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (% ( 2024 ) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) ( 2025 ) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) ( 2024 ) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 40 PD | 30 PD | 40 Perangkat Daerah | 40 Perangkat Daerah | 100% | 40 Perangkat Daerah | 40 Perangkat Daerah | 1 |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo, ada beberapa indikator yang menjadi aspek pelayanan yaitu :

**Tabel T-C.30**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

**Kabupaten probolinggo**

| No | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | **Renstra 2024-2026** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Prosentase Lembaga dan Entitas Masyarakat Yang Memanfaatkan Layanan Informasi dan komunikasi publik | | | 50% | 60% | 70% | - | 96% | - | - | - | - |
| 2 | Prosentase Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral sesuai dengan standar yang berlaku | | | 50% | 60% | 70% | - | 90% | - | - | - | - |
| | **Renstra 2025-2029 (IKU)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Masyarakat Digital (IMDI) Pilar 1 : Infrastruktur dan Ekosistem | | | 42,68 | 43,50 | 44,00 | 44,50 | 42,68 | - | 44,00 | 44,50 | - |
| 2 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | | | 2,31 | 2,32 | 2,33 | 2,34 | 2,31 | - | 2,33 | 2,34 | - |
| 3 | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI / Penilaian Mandiri) | | | 52,56 | 53,00 | 53,50 | 54,00 | 52,56 | - | 53,50 | 54,00 | - |

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja diskominfo 2025 dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statitik dan Persandian telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT di pemerintah daerah di berbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya :

1. Keterpaduan Infrastruktur jaringan intra Pemerintah, Akses Internet, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Pusat Data, Aplikasi, Domain dan e-mail resmi belum optimal;
2. Respon Call Center 112 masih terbatas; koordinasi lintas OPD dalam tindak lanjut laporan belum optimal
3. Aplikasi antar-OPD belum terintegrasi; masih terjadi *data silo*; adopsi aplikasi umum pusat belum optimal;
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Digital serta pemenuhan kebutuhan dan penempatannya belum ideal.
5. Penerapan digital administrasi pemerintahan dan layanan digital publik yang terintegrasi masih belum optimal.
6. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal.
7. Forum Satu Data Kabupaten Probolinggo belum optimal.
8. Perlu adanya monitoring Satu Data sesuai dengan rencana aksi satu data
9. Masih kurangnya pemahaman terhadap Satu Data Indonesia di lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo
10. Belum optimalnya kolaborasi antar Perangkat Daerah terkait Satu Data Daerah.
11. Penyusunan kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi Perlu diadakan
12. Dokumen analisis ancaman siber perlu diadakan
13. Perlu peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.

14. Koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah belum optimal.

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Probolinggo masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Dari sisi infrastruktur TIK, keterpaduan jaringan intra pemerintah, akses internet, sistem penghubung layanan, pusat data, aplikasi, hingga penggunaan domain dan e-mail resmi belum berjalan optimal. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas layanan pemerintahan digital dan integrasi sistem antar perangkat daerah.

Di sisi layanan publik, Call Center 112 sebagai saluran aduan dan layanan darurat masih terbatas responnya, terutama karena koordinasi lintas perangkat daerah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat belum maksimal. Hal ini turut dipengaruhi oleh belum terintegrasinya aplikasi antar-OPD yang masih berjalan sendiri-sendiri (data silo) dan rendahnya tingkat adopsi aplikasi umum yang disediakan oleh pemerintah pusat.

Permasalahan lain juga muncul dari sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas SDM digital di lingkup pemerintah daerah, termasuk di Diskominfo, masih belum memenuhi kebutuhan ideal. Penempatan SDM pun belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga berimplikasi pada rendahnya kemampuan dalam mengelola layanan digital, sistem keamanan informasi, hingga inovasi berbasis teknologi.

Selain itu, penerapan administrasi pemerintahan digital dan layanan publik terintegrasi belum sepenuhnya optimal. Keterbukaan informasi publik, baik antar sektor pemerintahan, antara pemerintah dengan stakeholder, maupun dengan masyarakat, juga masih terbatas sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan kurang maksimal.

Dalam konteks tata kelola data, Forum Satu Data Kabupaten Probolinggo yang seharusnya menjadi ruang koordinasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah belum berjalan optimal. Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data belum konsisten, pemahaman perangkat daerah terhadap konsep Satu Data Indonesia masih rendah, serta kolaborasi lintas OPD belum terbangun kuat. Akibatnya, penyediaan data yang berkualitas, mutakhir, dan terintegrasi belum sepenuhnya terwujud.

Di bidang keamanan informasi, hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki kebijakan internal manajemen keamanan informasi yang jelas, serta belum menyusun dokumen analisis ancaman siber. Padahal, hal tersebut sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintah daerah dari ancaman kejahatan siber.

Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah menjadi benang merah yang memperberat berbagai permasalahan di atas. Tanpa perbaikan pada aspek ini, upaya mewujudkan digitalisasi pemerintahan, keterbukaan informasi publik, tata kelola data, hingga peningkatan keamanan siber akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Informatika Kab. Probolinggo dari sisi internal antara lain: tersedianya Sumber Daya Manusia, tersedianya anggaran dan sarana prasarana, tersedianya tupoksi yang mendukung penyebarluasan informasi dan pengembangan TIK. Dari sisi eksternal peluang yang dimiliki antara lain kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi, dan kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun isu-isu strategisnya antara lain adalah:

1. Mendorong percepatan transformasi digital pemerintah.
2. Perkuatan koordinasi dan kolaborasi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.
4. Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik dan mencerahkan masyarakat.

Saran pemecahan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2026 adalah ;

1. Pengembangan e-government guna peningkatan kualitas layanan publik, baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, administrasi.

2. Mendorong percepatan transformasi digital pemerintah dengan melakukan optimalisasi penerapan SPBE menuju kerangka kerja Pemerintah Digital untuk mempercepat terwujudnya layanan digital nasional, melalui upaya mendorong transformasi secara komprehensif
3. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan cara penguatan kordinasi dan kolaborasi melalui Tim Koordinasi SPBE di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk keselarasan dan keterpaduan langkah, melalui upaya penguatan peran dan tugas
4. Peningkatan diseminasi program pembangunan Pemerintah Daerah dan layanan publik yang diberikan.
5. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani infrastruktur jaringan TIK.
6. Pelatihan untuk pegawai dalam bidang keilmuwan komunikasi dan Informatika
7. Peningkatan aksessibilitas informasi melalui pengurangan blind spot diwilayah Kabupaten Probolinggo
8. Sosial Analitik dan Media Analitik sebagai sarana monitoring isu untuk perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik
9. Mengupayakan peran serta aktif masyaarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat.
10. Mengaktifkan peran Forum Satu Data Kabupaten Probolinggo.
11. Memastikan secara hukum dan mengaktifkan tenaga Verifikator dan Operator data untuk setiap perangkat daerah .
12. Mengupayakan penambahan SDM terkait bidang statistik di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maupun di seluruh OPD Kabupaten Probolinggo.
13. Meningkatkan SDM dalam pemahaman Satu Data dengan melakukan pembinaan/bimbingan terkait satu data untuk Verifikator dan Operator.
14. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi Perangkat Daerah dalam peningkatan Satu Data

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Review terhadap rancangan awal merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo tahun 2025 - 2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo yang dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Disamping itu Dokumen Rencana Kerja juga memuat Program Kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Dengan demikian akan dapat diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Probolinggo

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **Nilai LHE AKIP PD** | **82** | **6.386.014.500,00** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **Nilai LHE AKIP PD** | **82** | **6.386.014.500,00** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Prosentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersusun Tepat Waktu** | **90%** | **145.725.600,00** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Prosentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersusun Tepat Waktu** | **90%** | **145.725.600,00** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 12.622.600,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 12.622.600,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 791.800,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 791.800,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 791.800,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 791.800,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 791.800,00 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 791.800,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 791.800,00 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 791.800,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 2.035.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 2.035.000,00 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 7.900.800,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 7.900.800,00 | |
| | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Berita Acara | - | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Berita Acara | - | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | 0 Substansi | - | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | 0 Substansi | - | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Prosentase dokumen penatausahaan keuangan yang disusun, prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu** | **95,00%** | **4.734.362.900,00** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Prosentase dokumen penatausahaan keuangan yang disusun, prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu** | **95,00%** | **4.734.362.900,00** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang/bulan | 4.723.876.700,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang/bulan | 4.723.876.700,00 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0 Dokumen | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0 Dokumen | | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 Dokumen | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 Dokumen | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | 1.203.200,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | 1.203.200,00 | |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 490.000,00 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 490.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 8.793.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 8.793.000,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Prosentase pelaksanaan administrasi kepegagawaian tepat waktu** | **85%** | **277.862.100,00** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Prosentase pelaksanaan administrasi kepegagawaian tepat waktu** | **85%** | **277.862.100,00** | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 35.762.600,00 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 35.762.600,00 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | 242.099.500,00 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | 242.099.500,00 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Persentase administrasi umum perangkat daerah** | **90%** | **277.126.100,00** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Persentase administrasi umum perangkat daerah** | **90%** | **277.126.100,00** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 82.862.000,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 82.862.000,00 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 43.162.000,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 43.162.000,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1.167.400,00 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1.167.400,00 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 9.064.700,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 9.064.700,00 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 3.194.800,00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 3.194.800,00 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 137.675.200,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 137.675.200,00 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Prosentase barang milik daerah tepat waktu** | **90%** | **40.600.900,00** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Prosentase barang milik daerah tepat waktu** | **90%** | **40.600.900,00** | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 40.600.900,00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 40.600.900,00 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Prosentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **90%** | **610.630.100,00** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Prosentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **90%** | **610.630.100,00** | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 13.273.300,00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 13.273.300,00 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 30.626.000,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 30.626.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 566.730.800,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 566.730.800,00 | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Prosentase barang milik daerah kondisi baik** | **90%** | **299.706.800,00** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Prosentase barang milik daerah kondisi baik** | **90%** | **299.706.800,00** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | 129.891.300,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | 129.891.300,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 169.815.500,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 169.815.500,00 | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | **Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik** | **50%** | **1.339.196.900,00** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | **Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik** | **50%** | **1.339.196.900,00** | |
| | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase Informasi yang disebarluaskan kepada publik** | **81%** | **1.339.196.900,00** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase Informasi yang disebarluaskan kepada publik** | **81%** | **1.339.196.900,00** | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Relasi Media | | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 130 Laporan | 76.023.100,00 | Relasi Media | | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 130 Laporan | 76.023.100,00 | |
| | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 10 Komunitas | 92.421.700,00 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 10 Komunitas | 92.421.700,00 | |
| | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | 0 Laporan | - | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | 0 Laporan | - | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Pelayanan Informasi Publik | | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 1 Permohonan | 399.942.200,00 | Pelayanan Informasi Publik | | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 1 Permohonan | 399.942.200,00 | |
| | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik | 0 Persentase | 0,00 | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik | 0 Persentase | 0,00 | |
| | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | 1 Rekomendasi | 114.500,00 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | 1 Rekomendasi | 114.500,00 | |
| | Diseminasi Informasi | | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik | 90 Persentase | 450.570.800,00 | Diseminasi Informasi | | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik | 90 Persentase | 450.570.800,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 12 Media | 304.291.500,00 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 12 Media | 304.291.500,00 | |
| | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | 1 Dokumen | 15.833.100,00 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | 1 Dokumen | 15.833.100,00 | |
| | Penyusunan Konten | | Jumlah Konten Informasi Publik | 0 Konten | - | Penyusunan Konten | | Jumlah Konten Informasi Publik | 0 Konten | - | |
| | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | Orang | - | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | Orang | - | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | Indeks Masyarakat Digital (IMDI)<br>Sub Pilar 1.3 : Digitalisasi Pemerintah | 76 | **4.068.892.200,00** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | Indeks Masyarakat Digital (IMDI)<br>Sub Pilar 1.3 : Digitalisasi Pemerintah | 76 | **4.068.892.200,00** | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Nama Domain, Sub Domain dan Domain Desa Yang Terdaftar di pemerintah Daerah dan Pusat** | **116 Sub Domain** | 472.000,00 | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Nama Domain, Sub Domain dan Domain Desa Yang Terdaftar di pemerintah Daerah dan Pusat** | **116 Sub Domain** | 472.000,00 | |
| | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 1 Dokumen | 472.000,00 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 1 Dokumen | 472.000,00 | |
| | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase layanan Pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan** | **30%** | **4.068.420.200,00** | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase layanan Pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan** | **30%** | **4.068.420.200,00** | |
| | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional | 10 Aplikasi | 114.449.700,00 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional | 10 Aplikasi | 114.449.700,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | 1 Dokumen | 114.500,00 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | 1 Dokumen | 114.500,00 | |
| | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 29 Perangkat Daerah | 1.858.406.000,00 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 29 Perangkat Daerah | 1.858.406.000,00 | |
| | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | 2 Layanan | 1.000.000,00 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | 2 Layanan | 1.000.000,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | 1 Dokumen | 8.575.300,00 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | 1 Dokumen | 8.575.300,00 | |
| | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE | 7 Aplikasi | 26.000.000,00 | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE | 7 Aplikasi | 26.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali | 1 Laporan | 8.575.300,00 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali | 1 Laporan | 8.575.300,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan | | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 1 Aplikasi | 15.925.600,00 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan | | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 1 Aplikasi | 15.925.600,00 | |
| | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 1 Laporan | 192.149.500,00 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 1 Laporan | 192.149.500,00 | |
| | Penyediaan Akses Internet | | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | 29 Perangkat Daerah | 1.000.000.000,00 | Penyediaan Akses Internet | | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | 29 Perangkat Daerah | 1.000.000.000,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 260.844.600,00 | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 260.844.600,00 | |
| | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 2 Dokumen | 567.458.700,00 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 2 Dokumen | 567.458.700,00 | |
| | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | 1 Dokumen | 14.921.000,00 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | 1 Dokumen | 14.921.000,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | **Prosentase Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral sesuai dengan Standar yang Berlaku** | **41%** | **185.665.200,00** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | **Prosentase Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral sesuai dengan Standar yang Berlaku** | **41%** | **185.665.200,00** | |
| | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase data statistik daerah yang dipublikasikan** | **41%** | **185.665.200,00** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase data statistik daerah yang dipublikasikan** | **41%** | **185.665.200,00** | |
| | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik | 80 % | 82.941.600,00 | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik | 80 % | 82.941.600,00 | |
| | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk | 80% | 39.562.600,00 | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk | 80% | 39.562.600,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. | 0 % | - | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. | 0 % | - | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | 50 Orang | 63.161.000,00 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | 50 Orang | 63.161.000,00 | |
| | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral | 0 % | - | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral | 0 % | - | |
| | Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah | 0 Laporan | - | Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah | 0 Laporan | - | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | **Persentase Sistem Elektronik Perangkat Daerah yang Diamankan** | **51,50%** | **143.505.000,00** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | **Persentase Sistem Elektronik Perangkat Daerah yang Diamankan** | **51,50%** | **143.505.000,00** | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan identifikasi kerentanan** | **12 Dokumen** | **76.617.500,00** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan identifikasi kerentanan** | **12 Dokumen** | **76.617.500,00** | |
| | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan | 56.055.500,00 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan | 56.055.500,00 | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | 1 Laporan | 20.562.000,00 | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | 1 Laporan | 20.562.000,00 | |
| | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian | 0 Perangkat Daerah | - | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian | 0 Perangkat Daerah | - | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian | 0 Dokumen | - | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian | 0 Dokumen | - | |
| | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah pola hubungan Komunikasi sandi antar perangkat Daerah** | **12 Dokumen** | **66.887.500,00** | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah pola hubungan Komunikasi sandi antar perangkat Daerah** | **12 Dokumen** | **66.887.500,00** | |

| No | Rancangan Awal RKPD (Pagu Renstra 2024-2026) | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. | 1 Kegiatan | 66.887.500,00 | Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. | 1 Kegiatan | 66.887.500,00 | |
| | **Jumlah** | | | | **12.123.273.800,00** | **Jumlah** | | | | **12.123.273.800,00** | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain merencanakan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga melaksanakan perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) baik tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan maupun tingkat Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat Kabupaten Probolinggo tentang pembangunan di daerahnya.

Dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan *(Musrenbang),* Dinas Komunikasi Informatika Statitik dan Persandian akan mengadakan pelatihan Website dan pelatihan Bimtek Pembuat Berita dan Konten Video sebanyak 10 paket yang akan dilaksanakan di beberapa Desa yang berada di Kabupaten Probolinggo.

**Tabel T-C.32.**
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026**
**Kabupaten Probolinggo**
**Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian**

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | **Usulan Aspirasi Masyarakat** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | |
| | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | Balai Desa Pohsangit Lor Dusun Kelor RT 011 RW 003 | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 3.200.000,00 | Pelatihan pembuatan website pagi para perangkat Desa agar dapat memenuhi kewajiban administrasinya dengan baik dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | 50.000.000,00 | Digunakan untuk melengkapi fasilitas kantor, seperti meja rapat dan tamu, komputer dan printer. Selain itu, di tengah perkembangan media, perlu peningkatan kapasitas para jurnalis. Salah satunya dengan melakukan studi banding dan mendatangkan narasumber yang kompeten. |
| | **JUMLAH** | | | **53.200.000,00** | |
| | | | | | |
| | **Usulan Pokir** | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| 1 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Probolinggo | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 19.450.000,00 | Membutuhkan Alat Multimedia Digital |
| 2 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Komunitas Negeri Dolanan Anak Desa (Desa Jatiurip Krejengan ) | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 117.599.000,00 | Kurang tersedianya peralatan multimedia |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 3 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Komunitas Lensa Citra Nusa Kecamatan Besuk (Besuk Agung) | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 50.000.000,00 | Pengembangan Teknologi Di tingkat Desa |
| 4 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Pokmas Bintang Bulu | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 784.100.000,00 | Hibah alat multimedia kelompok masyarakat bintang bulu |
| | **JUMLAH** | | | **971.149.000,00** | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanan Program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo harus merujuk pada sasaran dan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan Nasional secara keseluruhan. Kebijakan di bidang kominfo akan sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian nasioanl. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan SDM dalam bidang kominfo masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prsarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal.

Visi kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada visi dan misi RPJMN 2025-2029 yaitu **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.** Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai 6 fokus strategis yang menjadi pedoman operasional kementerian, yang setara dengan misi kementerian dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Konektivitas Digital

   Menyediakan infrastruktur internet yang merata dan berkualitas hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
2. Ekonomi Digital

   Mendorong inovasi di sektor strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berbasis digital ~8%, termasuk dukungan

bagi startup lokal dan adopsi teknologi baru seperti AI.

3. Pemerintahan Digital

   Modernisasi layanan publik (digital government), tata kelola berbasis identitas digital, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, serta pembangunan Pusat Data Nasional.

4. Perlindungan Ruang Digital

   Menjamin ruang digital yang aman dan terpercaya: pengawasan konten ilegal, privasi, serta mendorong ekosistem digital yang adil.

5. SDM Digital

   Membangun talenta digital berkualitas melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan literasi digital masyarakat.

6. Komunikasi publik

   Menyampaikan informasi publik yang mudah dipahami, membangun kepercayaan, menjaga ekosistem media, dan mendorong partisipasi publik.

Dalam rencana strategis Kementerian Kominfo pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan di prioritaskan pada upaya percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik..

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi :

1. Tersedianya Infrastruktur TIK yang Merata dan Andal
   - Mempercepat pembangunan jaringan internet hingga ke daerah 3T.
   - Optimalisasi pemanfaatan Satelit SATRIA, BTS USO, dan Palapa Ring.
   - Integrasi infrastruktur untuk pemerataan konektivitas digital.
2. Terselenggaranya Pemerintahan Digital yang Efektif
   - Mewujudkan layanan publik berbasis digital (SPBE).

- Pengembangan Pusat Data Nasional (PDN) dan identitas digital.
- Interoperabilitas layanan antarinstansi dan sistem keamanan data.

3. Terwujudnya Ruang Digital yang Aman dan Produktif
    - Pencegahan dan penanganan konten negatif (hoaks, radikalisme, judi online, dll).
    - Penegakan hukum siber dan pelindungan data pribadi.
    - Peningkatan kapasitas keamanan siber nasional.
4. Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik dan Informasi Pembangunan
    - Meningkatkan peran media pemerintah dan diseminasi informasi pembangunan.
    - Menguatkan literasi media dan keterlibatan publik dalam komunikasi kebijakan.
    - Mendukung keterbukaan informasi publik dan penguatan demokrasi digital.
5. Tumbuhnya Ekonomi Digital Nasional yang Inklusif
    - Mendukung UMKM dan startup dalam adopsi teknologi digital.
    - Memperkuat ekosistem e-commerce, fintech, dan industri kreatif digital.
    - Mendorong pertumbuhan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional.
6. Terciptanya SDM Digital yang Kompeten dan Produktif
    - Program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy.
    - Pelatihan literasi digital bagi masyarakat umum, ASN, guru, pelajar, dan UMKM
    - Meningkatkan daya saing SDM untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan 5.0.

Adapun arah kebijakan Provinsi Jawa Timur tertuang dalam Visi Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya menjadi pedoman Kominfo Provinsi Jawa Timur yaitu: " **Bersama Jawa Timur Maju Yang Adil, Makmur, Unggul Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”**. Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo dengan mengacu pada misi (Nawa Bhakti Satya)

**Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif".**

Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dan dalam rangka mendukung program – program Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati yaitu : **" *"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE" (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)".***

Dalam rangka mencapai Visi tersebut telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Misi sebagai berikut :

1. ***Sae Pemerintahan***
   Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif
2. ***Sae Ekononi***
   Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan.
3. ***Sae Pendidikan dan Kesehatan***
   Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau.
4. ***Sae Infrastruktur***
   Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata.
5. ***Sae Sosial***
   Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas

Adapun tema Pembangunan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Inovasi dan Sinergitas Pembangunan Berkelanjutan.”

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika dan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Persandian, dan urusan Pemerintah Daerah dibidang Statistik.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sesuai dengan tupoksinya Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Persandian, dan urusan Pemerintahan daerah di bidang statistik serta tugas pembantuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Digital

Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

1. Meningkatkanya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Layanan Informasi dan Teknologi yang efektif dan efisien
3. Terselenggaranya statistik yang akurat dan dapat diandalkan
4. Terwujudnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang baik

## 3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksankan tiga urusan yaitu Urusan komunikasi dan informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian. Adapun program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Probolinggo
Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LHE AKIP PD** | | **82** | **5.427.902.014,64** | **-** | | **83** | **5.488.300.000,00** |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Prosentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersusun Tepat Waktu** | | **90%** | **60.000.000,00** | **-** | | **90%** | **15.416.450,00** |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2 Dokumen | 53.518.960,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 2 Dokumen | 6.090.650,00 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 772.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 1 Dokumen | 849.200,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 271.840,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 1 Dokumen | 299.200,00 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | 1 Dokumen | 872.160,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 1 Dokumen | 959.200,00 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 1 Dokumen | 271.840,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 1 Dokumen | 299.200,00 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 4 Laporan | 2.203.160,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 4 Laporan | 2.423.300,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 1 Laporan | 2.090.040,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 1 Laporan | 2.295.700,00 |
| 8 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 0 Berita Acara | - | - | | 1 Berita Acara | 1.100.000,00 |
| 9 | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | 0 Substansi | - | - | | 1 Substansi | 1.100.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Prosentase dokumen penatausahaan keuangan yang disusun, prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu** | | **95,00%** | **4.742.139.798,64** | - | | **95,00%** | **5.136.773.211,00** |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 32 Orang/bulan | 4.722.139.798,64 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 32 Orang/bulan | 5.125.713.778,00 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 1 Dokumen | 10.337.600,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | 1 Dokumen | 2.848.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 1 Dokumen | 2.080.000,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 3 Laporan | 1.700.560,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 3 Laporan | 1.718.233,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | 1 Dokumen | 624.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | 12 Laporan | 4.489.840,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 12 Laporan | 5.261.200,00 |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Prosentase pelaksanaan administrasi kepegagawaian tepat waktu** | | **85%** | **-** | **-** | | **85%** | **23.502.600,00** |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | 0 Dokumen | - | - | | 2 Dokumen | 7.002.600,00 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | 0 Orang | - | - | | 5 Orang | 16.500.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase administrasi umum perangkat daerah** | | **90%** | **101.760.000,00** | | | **90%** | **63.149.551,00** |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 5 Paket | 11.725.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 5 Paket | 27.467.550,00 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | 0 Paket | - | - | | 3 Paket | 4.389.880,00 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 2 Paket | 16.579.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 2 Paket | 11.276.100,00 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | 1 Paket | 6.120.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 2 Paket | 8.302.800,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 12 Laporan | 67.336.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 12 Laporan | 11.713.221,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Prosentase barang milik daerah tepat waktu** | | **90%** | - | - | | **90%** | 88.284.240,00 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | 0 Unit | - | - | | 12 Unit | 88.284.240,00 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Prosentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | | **90%** | **325.762.216,00** | | | **90%** | **22.758.336,00** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 0 Laporan | - | - | | 12 Laporan | 13.860.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 12 Laporan | 7.000.000,00 | DANA BAGI HASIL (DBH) | | 12 Laporan | 6.886.021,00 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 12 Laporan | 318.762.216,00 | DANA BAGI HASIL (DBH) | | 12 Laporan | 2.012.315,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Prosentase barang milik daerah kondisi baik** | | **90%** | **198.240.000,00** | | | **90%** | **138.415.612,00** |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | 13 Unit | 188.700.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 13 Unit | 127.789.612,00 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 4 Unit | 9.540.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 5 Unit | 10.626.000,00 |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **73,45%** | **2.241.149.000,00** | | | **73,50%** | **1.266.100.000,00** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Informasi yang disebarluaskan kepada publik** | | **81%** | **2.241.149.000,00** | | | **81%** | **1.266.100.000,00** |
| | Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | | 120 Laporan | 40.000.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 120 Laporan | 38.500.000,00 |
| | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | | 30 Komunitas | 996.149.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | 40 Komunitas | 6.600.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | | 0 Laporan | 0,00 | - | | 0 Laporan | - |
| | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | | 4 Permohonan | 50.000.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 4 Permohonan | 15.400.000,00 |
| | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik | | 0 Persentase | 0,00 | - | | 24 Persentase | 25.245.000,00 |
| | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | | 3 Rekomendasi | 15.000.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 3 Rekomendasi | 42.900.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Diseminasi Informasi | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik | | 17 Persentase | 90.000.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 18 Persentase | 59.400.000,00 |
| | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | | 7 Media | 1.000.000.000,00 | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | | 7 Media | 1.074.755.000,00 |
| | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | | 0 Dokumen | 0,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 3 Dokumen | 1.200.000,00 |
| | Penyusunan Konten | Jumlah Konten Informasi Publik | | 0 Konten | 0,00 | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | | 1550 Konten | 1.100.000,00 |
| | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | | 1 Orang | 50.000.000,00 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 1 Orang | 1.000.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika** | | **57,73** | **378.200.000,00** | - | | **57,75** | **1.382.500.000,00** |
| | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Nama Domain, Sub Domain dan Domain Desa Yang Terdaftar di pemerintah Daerah dan Pusat** | | **116 Sub Domain** | **-** | - | | **116 Sub Domain** | **110.000,00** |
| | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | | 1 Dokumen | - | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 1 Dokumen | 110.000,00 |
| | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase layanan Pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan** | | **30%** | **378.200.000,00** | **-** | | **30%** | **1.382.390.000,00** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional | | 30 Aplikasi | 35.000.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 30 Aplikasi | 179.740.000,00 |
| | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 1 Dokumen | 181.339.400,00 |
| | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | 0 Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | | 29 Perangkat Daerah | 136.528.400,00 |
| | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | | 0 Layanan | 0,00 | 0,00 | | 1 Layanan | 1.760.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | | 0 Dokumen | 0,00 | - | | 1 Dokumen | 1.320.000,00 |
| | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE | | 9 Aplikasi | 250.000.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 9 Aplikasi | 296.075.358,00 |
| | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali | | 0 Laporan | 0,00 | - | | 1 Laporan | 94.453.042,00 |
| | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | | 0 Aplikasi | 0,00 | - | | 4 Aplikasi | 2.860.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | 0 Laporan | 20.000.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 1 Laporan | 1.100.000,00 |
| | Penyediaan Akses Internet | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | | 0 Perangkat Daerah | 0,00 | - | | 29 Perangkat Daerah | 266.094.000,00 |
| | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | | 0 Dokumen | 10.000.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 1 Dokumen | 1.100.000,00 |
| | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | | 2 Dokumen | 23.200.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | | 2 Dokumen | 217.379.800,00 |
| | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | | 0 Dokumen | 0,00 | - | | 24 Dokumen | 2.640.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah** | | **48,10** | **75.000.000,00** | **-** | | **48,12%** | **75.900.000,00** |
| | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase data statistik daerah yang dipublikasikan** | | **41%** | **75.000.000,00** | **-** | | **42%** | **75.900.000,00** |
| | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik | | 80 % | 75.000.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 80% | 1.999.730,00 |
| | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk | | 0 % | 0,00 | - | | 80% | 40.569.000,00 |
| | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. | | 0 % | - | - | | 80% | 3.188.416,00 |
| | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | | 0 Orang | - | - | | 50 Orang | 28.142.854,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral | | 0 % | - | - | | 80% | 1.000.000,00 |
| | Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah | | 0 Laporan | - | - | | 1 Laporan | 1.000.000,00 |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota** | | **53,50%** | **50.000.000,00** | **-** | | **54,00%** | **50.600.000,00** |
| | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan identifikasi kerentanan** | | **12 Dokumen** | **25.000.000,00** | **-** | | **12 Dokumen** | **20.680.000,00** |
| | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 1 Laporan | 17.920.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | | 0 Laporan | - | - | | 1 Laporan | 1.000.000,00 |
| | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian | | 0 Perangkat Daerah | - | - | | 3 Perangkat Daerah | 660.000,00 |
| | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian | | 0 Dokumen | - | - | | 1 Dokumen | 1.100.000,00 |
| | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah pola hubungan Komunikasi sandi antar perangkat Daerah** | | **12 Dokumen** | **25.000.000,00** | **-** | | **12 Dokumen** | **29.920.000,00** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. | | 1 Kegiatan | 25.000.000,00 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | | 12 Kegiatan | 29.920.000,00 |
| | **Jumlah** | | | | **8.172.251.014,64** | **Jumlah** | | | **8.263.400.000,00** |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Probolinggo yang harus diselaraskan dengan Permendagri 90 Tahun 2020 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah:

**Unsur: Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik. (RKPD RI 2026)**

**I. Program Program Informasi dan Komunikasi Publik**

1. **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemereintah Daerah Kabupaten/Kota**
   - Relasi Media
   - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
   - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
   - Pelayanan Informasi Publik
   - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
   - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
   - Diseminasi Informasi
   - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
   - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
   - Penyusunan Konten
   - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

**II. Program Aplikasi Informatika**

1. **Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota**
   - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
2. **Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
   - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
   - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
   - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
   - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasiFasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan PemdaPenyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
   - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
   - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
   - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
   - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
   - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBEKoordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
   - Penyediaan Akses Internet
   - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
   - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
   - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

**III. Program Penyelenggartaan Statistik Sektoral**

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
   - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
   - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
   - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai StandarSektoral

**IV. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

1. **Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
   - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
   - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
   - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
   - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
2. **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**
   - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo ini disusun memperhatikan penyusunan RKPD Tahun 2026, Rencana Kerja (Renja) juga memperhatikan program dan prioritas sehingga Perangkat Daerah (PD) akan tepat sasaran dalam menjalankan Rencana Kerja (Renja) satu tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Kerja (Renja) yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan Perangkat Daerah (PD), dan tidak lepas dari kemampuan aparatur pelaksana program serta sarana dan prasarana yang tersedia dan partisipasi semua pihak yang terkait.

Probolinggo, Juli 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**ULFININGTYAS, SH, MM**
Pembina Tingkat I
NIP. 196811291996022002

PEMERINTAH
KABUPATEN
PROBOLINGGO

# RENJA

## RENCANA KERJA

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATENPROBOLINGGO
TAHUN 2026

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian
Tahun 2026

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga ***"Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026"*** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2026 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini

Probolinggo, Juli 2025

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Probolinggo

**TAUPIK ALAMI, S.Sos, M.Si**
Pembina Tk. I
NIP. 19700108 199602 1 001

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Landasan Hukum ..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 6

1.4 Sistematika Penulisan ..... 7

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH** ..... **9**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 28

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 31

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 34

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH** ..... **65**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... 65

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 68

3.3 Program dan Kegiatan ..... 68

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** ..... **80**

**BAB V PENUTUP** ..... **83**

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.** Rincian Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 ..... 10

**Tabel 2.** Analisa Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran ..... 18

**Tabel 3.** T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 KabupatenProbolinggo ..... 21

**Tabel 4.** T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian ..... 30

**Tabel 5.** T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Probolinggo ..... 35

**Tabel 6.** T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Probolinggo ..... **Error! Bookmark not defined.**

**Tabel 7.** T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ..... 71

**Tabel 8.** Program dan Kegiatan Tahun 2024 80

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Review Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Penyusunan Renja 2026 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat.

### 1.1 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- peraturan bupati probolinggo nomor : 50 tahun 2022 tentang rencana kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten probolinggo

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo 2026 yaitu : untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 Memuat Program, Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Serta Prakiraan Maju Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, yaitu :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;

2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;

4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## 1.3 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Tujuan dan Sasaran

D. Sistematika Penulisan

**BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU**

A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

.

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

C. Program dan Kegiatan

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**BAB V. PENUTUP**

# BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SAMPAI TW II

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja dibutuhkan untuk mengukur tingkat capaian dari terget yang telah ditetapkan secara periodik. Tercapaia atau tidaknya target pelaksanaan program,kegiatan serta sub kegiatan yang telah disusun dapat diketahui Dari Laporan Akuntablitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut maka RENJA Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan PerindustrianKabupaten Probolinggo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dasi hasil yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian selama tahun 2025 sampai triwulan II bulan Juni. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja dapat dilihat dari tebel dibawah ini :

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024.

Tabel 1. Rincian Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

| No. | Program/Kegiatan | Alokasi Biaya | | | Output/Keluaran | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % | Uraian | Target | Realisasi | % |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 18.345.028.408,00 | 8.969.443.612,00 | 25 | nilai sakip PD | 75 | 50 | 48,89 |
| 2.17.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 135.451.400,00 | 76.939.000,00 | 0 | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran | 20 | 10 | 56,80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kinerja Perangkat Daerah | | | | dan evaluasi kinerja yangdisusun dan dilaporkan tepat waktu | | | |
| 2.17.01.2.01.0001 | Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 125.150.000,00 | 76.939.000,00 | 0 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 | 10 | 61,48 |
| 2.17.01.2.01.0006 | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.301.400,00 | - | 0 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 | 0 | - |
| 2.17.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14.540.669.366,00 | 7.415.764.478,00 | 8 | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | 19 | 5 | 51,00 |
| 2.17.01.2.02.0001 | Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14.534.349.966,00 | 7.415.764.478,00 | 30 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 120 | 30 | 51,02 |
| 2.17.01.2.02.0005 | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.319.400,00 | - | 0 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil | 19 | 0 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| 2.17.01.2.03 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4.106.000,00 | - | 0 | Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 4 | 0 | - |
| 2.17.01.2.03.0006 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.106.000,00 | - | 0 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | 0 | - |
| 2.17.01.2.04 | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 155.030.800,00 | 70.434.500,00 | 15 | Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan tepat waktu | 21 | 15 | 45,43 |
| 2.17.01.2.04.0007 | Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 155.030.800,00 | 70.434.500,00 | 15 | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 19 | 15 | 45,43 |
| 2.17.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 91.028.250,00 | 19.774.800,00 | 10 | Prosentase pemenuhan administrasi umum PD | 100 | 10 | 21,72 |
| 2.17.01.2.06.0002 | Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 91.028.250,00 | 19.774.800,00 | 3 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 3 | 21,72 |
| 2.17.01.2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik | 216.305.100,00 | - | 0 | Prosentase pemenuhan BMD yang | 50 | 0 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | sesuai dengan RKBMD | | | |
| 2.17.01.2.07.0006 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 216.305.100,00 | - | 0 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 40 | 0 | - |
| 2.17.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.048.371.492,00 | 1.350.978.269,00 | 4 | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | 12 | 4 | 44,32 |
| 2.17.01.2.08.0002 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 98.852.524,00 | 56.476.854,00 | 4 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 4 | 57,13 |
| 2.17.01.2.08.0003 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.885.000,00 | 1.040.000,00 | 4 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 4 | 26,77 |
| 2.17.01.2.08.0004 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.945.633.968,00 | 1.293.461.415,00 | 4 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 4 | 43,91 |
| 2.17.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 154.066.000,00 | 43.152.800,00 | 30 | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam | 150 | 30 | 28,01 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemerintahan Daerah | | | | kondisi baik | | | |
| 2.17.01.2.09.0002 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 117.826.000,00 | 41.848.900,00 | 10 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 40 | 10 | 35,52 |
| 2.17.01.2.09.0006 | Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.300.000,00 | 5.710.000,00 | 5 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 | 5 | 28,13 |
| 2.17.01.2.09.0010 | Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.940.000,00 | - | 0 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 0 | - |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 56.207.500,00 | 25.574.920,00 | 10 | Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan | 82 | 10 | 45,50 |
| 2.17.03.2.01 | Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah | 56.207.500,00 | 25.574.920,00 | 10 | Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan | 82 | 10 | 45,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| 2.17.03.2.01.0003 | Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 25.403.000,00 | 13.274.920,00 | 10 | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 40 | 10 | 52,26 |
| 2.17.03.2.01.0004 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | 30.804.500,00 | 12.300.000,00 | 10 | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 30 | 10 | 39,93 |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 23.804.000,00 | - | 0 | Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya | 92 | 0 | - |
| 2.17.04.2.01 | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 23.804.000,00 | - | 0 | Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya | 82 | 0 | - |
| 2.17.04.2.01.0003 | Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan | 23.804.000,00 | - | 0 | Jumlah Koperasi yang Diberikan | 30 | 0 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | Penilaian Kesehatan | | | |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 75.030.750,00 | 11.600.000,00 | 20 | Persentase Kualitas Koperasi yang meningkat kapasitas SDMnya | 75 | 20 | 15,46 |
| 2.17.05.2.01 | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 75.030.750,00 | 11.600.000,00 | 8 | Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan | 25 | 8 | 15,46 |
| 2.17.05.2.01.0001 | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 75.030.750,00 | 11.600.000,00 | 80 | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 240 | 80 | 15,46 |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 69.631.750,00 | 4.124.500,00 | 10 | Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya | 25 | 10 | 5,92 |
| 2.17.06.2.01 | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 69.631.750,00 | 4.124.500,00 | 10 | jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi | 35 | 10 | 5,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.06.2.01.0009 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | 69.631.750,00 | 4.124.500,00 | 10 | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | 30 | 10 | 5,92 |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 1.070.900.000,00 | 15.285.000,00 | 0 | Peresentase UM yang meningkat omzetnya | 5 | 0 | 1,43 |
| 2.17.07.2.01 | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 1.070.900.000,00 | 15.285.000,00 | 0 | Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 600 | 0 | 1,43 |
| 2.17.07.2.01.0002 | Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | 40.000.000,00 | 5.625.000,00 | 0 | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 110 | 0 | 14,06 |
| 2.17.07.2.01.0003 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahaan Perizinan Usaha Mikro | 20.000.000,00 | 9.660.000,00 | 0 | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 8.300 | 0 | 48,30 |
| 2.17.07.2.01.004 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan | 10.900.000,00 | - | 0 | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan | 100 | 0 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Usaha Mikro | | | | dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | | | |
| 2.17.07.2.01.0015 | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | 1.000.000.000,00 | - | 0 | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 425 | 0 | - |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 120.000.000,00 | - | 0 | Persentase usaha mikro yang meningkat Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 0,1 | 0 | - |
| 2.17.08.2.01 | Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 120.000.000,00 | - | 0 | Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil | 2 | 0 | - |
| 2.17.08.2.01.0006 | Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 120.000.000,00 | - | 0 | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 70 | 0 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 5.044.200,00 | 1.000.000,00 | 5 | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha | 20 | 5 | 19,82 |
| 3.30.02.2.02 | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 5.044.200,00 | 1.000.000,00 | 1 | Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan | 5 | 1 | 19,82 |
| 3.30.02.2.02.0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 5.044.200,00 | 1.000.000,00 | 1 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 5 | 1 | 19,82 |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 2.050.262.000,00 | 97.621.363,00 | 0 | Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar SNI | 8,57 | 0 | 4,76 |
| 3.30.03.2.01. | Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1.957.075.000,00 | 93.837.363,00 | 0 | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi | 5 | 0 | 4,79 |
| 3.30.03.2.01.0002 | Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganga | 1.957.075.000,00 | 93.837.363,00 | 0 | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 35 | 0 | 4,79 |
| 3.30.03.2.02 | Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 93.187.000,00 | 3.784.000,00 | 0 | Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaan | 35 | 0 | 4,06 |
| | Subkegiatan | | | 0 | Jumlah | 35 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 93.187.000,00 | 3.784.000,00 | | Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | 4,06 |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 956.532.800,00 | 913.946.000,00 | 60 | Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil | 61,11 | 60 | 95,55 |
| 3.30.04.2.02 | Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 941.283.300,00 | 912.946.000,00 | 10 | Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan | 11 | 10 | 96,99 |
| 3.30.04.2.02.0002 | Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 12.626.300,00 | 2.829.000,00 | 100 | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 365 | 100 | 22,41 |
| 3.30.04.2.02.0003 | Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang | 928.657.000,00 | 910.117.000,00 | 4 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus | 5 | 4 | 98,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | |
| 3.30.04.2.03 | Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15.249.500,00 | 1.000.000,00 | 0,5 | Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan | 72 | 0,5 | 6,56 |
| 3.30.04.2.03.0003 | Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 15.249.500,00 | 1.000.000,00 | 5 | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 72 | 5 | 6,56 |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 87.304.000,00 | - | 0 | Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah | 85,71 | 0 | - |
| 3.30.05.2.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 87.304.000,00 | - | 0 | Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi | 35 | 0 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30.05.2.01.0002 | Sub kegiatan Pameran Dagang Nasional | 75.265.500,00 | - | 0 | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 25 | 0 | - |
| 3.30.05.2.01.0004 | Sub kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | 12.038.500,00 | - | 0 | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 15 | 0 | - |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 131.000.000,00 | 26.807.235,00 | 20 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku | 95 | 20 | 20,46 |
| 3.30.06.2.01 | Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 131.000.000,00 | 26.807.235,00 | 10 | Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang | 50 | 10 | 20,46 |
| 3.30.06.2.01.0001 | Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 105.500.000,00 | 19.307.235,00 | 500 | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 7500 | 500 | 18,30 |
| 3.30.06.2.01.0002 | Sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | 25.500.000,00 | 7.500.000,00 | 500 | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 1200 | 500 | 29,41 |
| 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN | 259.089.000,00 | 250.600.000,00 | 0 | Persentase produk unggulan daerah yang | | 0 | 96,72 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUK DALAM NEGERI | | | | digunakan dan dipasarkan di dalam negeri | | | |
| 3.30.07.2.01 | Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 259.089.000,00 | 250.600.000,00 | 0 | Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi | 35 | 0 | 96,72 |
| 3.30.07.2.01.0006 | Sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 259.089.000,00 | 250.600.000,00 | 0 | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 35 | 0 | 96,72 |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 4.971.203.150,00 | 28.916.921,00 | 0,5 | Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan | 50 | 0,5 | 0,58 |
| 3.31.02.2.01 | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 4.971.203.150,00 | 28.916.921,00 | 0,5 | Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan | 50 | 0,5 | 0,58 |
| 3.31.02.2.01.0002 | Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan | 700.000.000,00 | 10.825.020,00 | 0,5 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, | 1 | 0,5 | 1,55 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | , Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | Pengembangan , Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | |
| 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industr | 170.000.000,00 | - | 0 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 2 | | - |
| 3.31.02.2.01.0005 | Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 4.101.203.150,00 | 18.091.901,00 | 0 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 3 | 0 | 0,44 |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 24.000.000,00 | 4.142.200,00 | 15 | Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas | 25 | 15 | 17,26 |
| 3.31.04.2.01 | Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 24.000.000,00 | 4.142.200,00 | 30 | Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS | 105 | 30 | 17,26 |
| | Sub kegiatan | | | 5 | Jumlah | 20 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | 24.000.000,00 | 4.142.200,00 | | Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | 17,26 |

**Tabel 3.**

**T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 KabupatenProbolinggo**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | nilai sakip PD | 75 | 74,76 | 75 | 74,76 | 99,68 | 75 | 50 | 99,68 |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yangdisusun dan dilaporkan tepat waktu | 20 | 65,10 | 19 | 16 | 99,68 | 20 | 10 | 99,68 |
| | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 | 93,92 | 19 | 8,75 | 99,68 | 9 | 10 | 99,68 |
| | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 | 29,83 | 11 | 6,75 | 99,68 | 11 | 0 | 0 |

***Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian***

***Kabupaten Probolinggo***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | 19 | 74,15 | 19 | 20,75 | 99,68 | 19 | 5 | 99,68 |
| | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1440 | 74,12 | 120 | 1074 | 99,68 | 1440 | 30 | 99,68 |
| | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 19 | 76,36 | 19 | 14,75 | 99,68 | 19 | 0 | 0 |
| | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 4 | - | 4 | 4 | 99,68 | 4 | 0 | 0 |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | - | 5 | 4,25 | 99,68 | 4 | 0 | 0 |
| | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan tepat waktu | 21 | - | 21 | 15,25 | 99,68 | 21 | 15 | 99,68 |
| | Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 19 | - | 19 | 14,75 | 99,68 | 19 | 15 | 99,68 |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase pemenuhan administrasi umum PD | 100 | 50,00 | 100 | 130 | 99,68 | 100 | 10 | 99,68 |
| | Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 12,00 | 12 | 14 | 99,68 | 12 | 3 | 99,68 |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | 50 | - | 50 | 275 | 99,68 | 50 | 0 | 0 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 40 | - | 40 | 115 | 99,68 | 40 | 0 | 0 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | 12 | 50,00 | 12 | 18 | 99,68 | 12 | 4 | 99,68 |

***Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian***

***Kabupaten Probolinggo***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 9,00 | 12 | 10 | 99,68 | 12 | 4 | 99,68 |
| | Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 9,00 | 12 | 12 | 99,68 | 12 | 4 | 99,68 |
| | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | - | 12 | 16 | 99,68 | 12 | 4 | 99,68 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 150 | - | 150 | 77,5 | 99,68 | 150 | 30 | 99,68 |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 40 | - | 40 | 29 | 99,68 | 40 | 10 | 99,68 |
| | Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 | - | 40 | 29 | 99,68 | 40 | 5 | 99,68 |
| | Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | - | 1 | 0,25 | 99,68 | 1 | 0 | 0 |
| | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan | 82 | 67,10 | 82 | 86,5 | 99,68 | 82 | 10 | 99,68 |
| | Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan | 82 | 3,50 | 82 | 86,5 | 99,68 | 82 | 10 | 99,68 |
| | Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan | 40 | - | 40 | 70 | 99,68 | 40 | 10 | 99,68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Daerah Kab/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 30 | - | | 31,5 | 99,68 | 30 | 10 | 99,68 |
| | Sub Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 30 | - | 30 | 71 | 99,68 | 30 | 0 | 0 |
| | Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja | 20 | 19,00 | 0 | 68,5 | 99,68 | 20 | 0 | 0 |
| | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya | 92 | 42,60 | 92 | 68,5 | 99,68 | 92 | 0 | 0 |
| | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya | 82 | - | 82 | 122,75 | 99,68 | 82 | 20 | 99,68 |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 40 | 21,00 | 82 | 6,25 | 99,68 | 40 | 8 | 99,68 |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Kualitas Koperasi yang meningkat kapasitas SDMnya | 75 | 63,29 | 75 | 120 | 99,68 | 75 | 80 | 99,68 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan | 25 | 5,25 | 25 | 46,25 | 99,68 | 25 | 10 | 99,68 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan | 240 | 180,00 | 240 | 38,75 | 99,68 | 240 | 10 | 99,68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dan Kompetensi SDM Koperasi | Perkoperasian | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya | 25 | 28,2 | 25 | 37,5 | 99,68 | 25 | 10 | 99,68 |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi | 35 | 3 | 35 | 2,642804201 | 99,68 | 35 | 0 | 0 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | | 30 | - | 30 | 125 | 99,68 | 30 | 0 | 0 |
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam | 94 | 82 | | 76,25 | 99,68 | 94 | 0 | 0 |
| | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase rekomendasi izin usaha koperasi yang diterbitkan | 30 | 7 | | 0 | 99,68 | 30 | 0 | 0 |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 30 | 10 | | 230 | 99,68 | 30 | 0 | 0 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Peresentase UM yang meningkat omzetnya | 5 | - | 5 | 0,025 | 99,68 | 5 | 0 | 0 |
| | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para | 500 | - | 500 | 0,25 | 99,68 | 500 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 105 | - | 105 | 16,25 | 99,68 | 105 | 0 | 0 |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahaan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 7.800 | - | 7.800 | 0 | 99,68 | 7.800 | 0 | 0 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 400 | - | 400 | 0 | 99,68 | 400 | 5 | 99,68 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 80 | - | | 5 | 99,68 | 80 | 1 | 99,68 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase usaha mikro yang meningkat Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 0,1 | - | 0,1 | 2,5 | 99,68 | 0,1 | 1 | 99,68 |
| | Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil | 1 | - | 1 | 1,25 | 99,68 | 1 | 0 | 0 |
| | Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 65 | - | 65 | 1,4275 | 99,68 | 65 | 0 | 0 |
| | Urusan Pemerintahan Pilihan | | | - | | 1,25 | 99,68 | | 0 | 0 |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | | | - | | 8,75 | 99,68 | | 0 | 0 |
| | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha | 20 | - | 20 | 8,75 | 99,68 | 20 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan | 5 | - | 5 | 16,75 | 99,68 | 5 | 60 | 99,68 |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 5 | - | 5 | 15,2775 | 99,68 | 5 | 10 | 99,68 |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar SNI | 5,71 | - | 5,71 | 2,75 | 99,68 | 5,71 | 100 | 99,68 |
| | Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi | 5 | - | 5 | 91,25 | 99,68 | 5 | 4 | 99,68 |
| | Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 5 | - | | 1,25 | 99,68 | 5 | 0,5 | 99,68 |
| | Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganga | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 35 | - | 35 | 18 | 99,68 | 35 | 5 | 99,68 |
| | Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaan | 35 | - | 35 | 18 | 99,68 | 35 | 0 | 0 |
| | Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 35 | - | 35 | 130,1925 | 99,68 | 35 | 0 | 0 |
| | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil | 61,11 | 3,50 | 61,11 | 33,5 | 99,68 | 61,11 | 0 | 0 |
| | Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan | 11 | 10,00 | 11 | 18,25 | 99,68 | 11 | 0 | 0 |
| | Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 365 | 6,00 | 365 | 17,75 | 99,68 | 365 | 20 | 99,68 |
| | Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 5 | - | 5 | 48,75 | 99,68 | 5 | 10 | 99,68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan | 72 | - | 72 | 37,5 | 99,68 | 72 | 500 | 99,68 |
| | Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 72 | 6,00 | 72 | 0 | 99,68 | 72 | 500 | 99,68 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah | 83,33 | 10,00 | 83,33 | 512,5 | 99,68 | 83,33 | 0 | 0 |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi | 30 | - | 30 | 96,2325 | 99,68 | 30 | 0 | 0 |
| | Subkegiatan Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 25 | 6,00 | 25 | 27,5 | 99,68 | 25 | 0 | 0 |
| | Subkegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 15 | - | 15 | 7,5 | 99,68 | 15 | 0,5 | 99,68 |
| | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku | 95 | 90,00 | 95 | 0 | 99,68 | 95 | 0,5 | 99,68 |
| | Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang | 50 | 90,00 | 50 | 0 | 99,68 | 50 | 0,5 | 99,68 |
| | Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 10600 | 10.000,00 | 10600 | 12,5 | 99,68 | 10600 | | 99,68 |
| | Subkegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 2050 | 1.700 | 2050 | 12,5 | 99,68 | 2050 | 0 | 0 |
| | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri | 83,33 | 3,55 | 83,33 | 0,25 | 99,68 | 83,33 | 15 | 99,68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi | 30 | - | 30 | 0,75 | 99,68 | 30 | 30 | 99,68 |
| | Sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 30 | 25,00 | 30 | 5 | 99,68 | 30 | 5 | 99,68 |
| | Urusan Pilihan | | | - | | 32,5 | 99,68 | | | 99,68 |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Perindutrian | | | - | | 37,5 | 99,68 | | | 99,68 |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan | 50 | - | 50 | 6,25 | 99,68 | 50 | | 99,68 |
| | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan | 50 | - | 50 | 20 | 99,68 | 50 | | 99,68 |
| | Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | 1 | - | 1 | 21 | 99,68 | 1 | | 99,68 |
| | Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 1 | - | 1 | | 99,68 | 1 | | 99,68 |
| | Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 3 | - | 3 | | 99,68 | 3 | | 99,68 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan | 20 | - | 20 | | 99,68 | 20 | | 99,68 |
| | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) | 50 | - | 50 | | 99,68 | 50 | | 99,68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kewenangan Kabupaten/Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya | | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 50 | - | 50 | | 99,68 | 50 | | 99,68 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas | 25 | - | 25 | | 99,68 | 25 | | 99,68 |
| | Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS | 80 | - | 80 | | 99,68 | 80 | | 99,68 |
| | Sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | 20 | - | 20 | | 99,68 | 20 | | 99,68 |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

**Tabel 4.** T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| **2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian** | | | | | | | | | | |
| **I** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase PDRB Perdagangan | 5% | 4,11 | 4,67 | 5,23 | 5,78 | 6,34 | 6,9 | 7,46 | |
| 2 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 27,19 | 27,35 | 27,43 | 27,44 | 27,45 | 27,47 | 27,48 | |
| **II** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | % | 20,23 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | |
| 2 | Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | % | 58,83 | 61,62 | 64,36 | 67,06 | 69,7 | 72,31 | 74,86 | |
| 3 | Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | % | 70,12 | 48 | 32 | 35,2 | 38,4 | 48 | 51,2 | |
| 4 | Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| | yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan. | | | | | | | | | |

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro melalui Penguatan kelembagaan dan basis data Koperasi dan Usaha Mikro, Peningkatan produktivitas baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standardisasi produk, Peningkatan akses pemasaran baik secara online maupun online serta Penguatan kapasitas SDM pengelola Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan (swasta dan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah), Peningkatan Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri serta pengendalian fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok.
3. Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan tertib niaga berupa Penertiban Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus.

4. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (hulu antara-hilir), Pengendalian Legalitas Usaha Industri, optimalisasi penerapan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk industry serta penguatan sistem informasi dan data industri

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan untuk menetukan prioritas pembangunan. Adapun isu-isu strategis yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

| NO | RPJMD | RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD | | |
|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| 1 | **SAE PENDAPATAN DAERAH** : INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAD | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |
| 2 | **SAE PENDAPATAN KELUARGA :** 2.000 UMKM NAIK KELAS **SAE PEREMPUAN BERDAYA SAING :** PAMERAN PRODUK UNGGULAN PEREMPUAN | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota |
| 3 | **SAE PEREMPUAN BERDAYA SAING :** PAMERAN PRODUK UNGGULAN PEREMPUAN | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pameran Dagang Nasional |
| 4 | **SAE KESEMPATAN KERJA :** 10 RUMAH KREATIF MILLENIAL **SAE GUS-TREN :** EKOTREN **(**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PESANTREN) **SAE PENDAPATAN KELUARGA :** 2.000 UMKM NAIK KELAS **SAE PENDAPATAN KELUARGA :** 3.000 TOKO KELONTONG NAIK KELAS **SAE PENDAPATAN KELUARGA :** ONE VILLAGE ONE PRODUCT **SAE PEREMPUAN BERDAYA SAING :** 1.000 PENGUSAHA PEREMPUAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro<br>2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro<br>3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro<br>4. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan |
| 5 | **SAE PENDAPATAN KELUARGA :** KOPERASI DESA MERAH PUTIH | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya | 1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi<br>2. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan |

| NO | RPJMD | RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD | | |
|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN |
| | | | dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota |
| 6 | **SAE PENDAPATAN KELUARGA :** KOPERASI DESA MERAH PUTIH | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan |
| 7 | **SAE PENDAPATAN KELUARGA :** KOPERASI DESA MERAH PUTIH | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi |
| 8 | **SAE KESEMPATAN KERJA :** MEMBANGUN PERWILAYAHAN INDUSTRI | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota | 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri<br>2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |
| 9 | **SAE KESEMPATAN KERJA :** MEMBANGUN PERWILAYAHAN INDUSTRI | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) |

Dengan adanya sub kegiatan prioritas ini, diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dapat mewujudkan tata kelola pembangunan sektor ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing pada periode 2025–2029.

1. **SAE Pendapatan Daerah : Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD**

Program prioritas RPJMD ini berkaitan erat dengan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Renstra PD. Keterkaitan ini mencerminkan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penguatan infrastruktur distribusi, tata niaga, serta penciptaan rantai pasok yang efisien. Dengan memperluas akses dan sarana perdagangan, maka sumber PAD dapat dioptimalkan dari aktivitas perdagangan lokal maupun antarwilayah.

2. **SAE Pendapatan Keluarga : 2.000 UMKM Naik Kelas & SAE Perempuan Berdaya Saing: Pameran Produk Unggulan Perempuan**

Program prioritas ini terhubung dengan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Keterkaitannya terletak pada tujuan yang sama, yaitu meningkatkan daya saing dan kemandirian UMKM serta mendorong konsumsi produk lokal. Pameran produk unggulan perempuan juga menjadi sarana strategis untuk memperluas pasar dan memperkuat branding produk, sehingga UMKM dapat naik kelas sekaligus memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan keluarga.

3. **SAE Perempuan Berdaya Saing : Pameran Produk Unggulan Perempuan**

Program ini terintegrasi dengan Program Pengembangan Ekspor. Hubungan keduanya menunjukkan orientasi kebijakan

yang tidak hanya memperkuat daya saing di pasar domestik, tetapi juga menembus pasar ekspor. Melalui fasilitasi promosi, jejaring internasional, dan peningkatan kualitas produk, produk unggulan perempuan diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung pada ekspor daerah.

4. **SAE Kesempatan Kerja : 10 Rumah Kreatif Millennial, SAE Gus-Tren : Ekotren, SAE Pendapatan Keluarga : 2.000 UMKM Naik Kelas, 3.000 Toko Kelontong Naik Kelas, One Village One Product, dan 1.000 Pengusaha Perempuan**

Seluruh program prioritas ini dikaitkan dengan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). Hubungan ini menggambarkan peran Renstra PD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, meningkatkan kesempatan kerja, serta membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing. Rumah Kreatif Millennial dan Ekotren menggarisbawahi penguatan ekonomi generasi muda dan pesantren, sementara target UMKM naik kelas, toko kelontong modern, serta pengusaha perempuan berdaya saing diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi keluarga dan masyarakat.

5. **SAE Pendapatan Keluarga : Koperasi Desa Merah Putih**

Program ini terkait dengan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Keterkaitannya menunjukkan bahwa pengembangan koperasi desa perlu didukung dengan pengawasan dan pemeriksaan yang baik agar koperasi tetap sehat, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga untuk memastikan keberlanjutan koperasi sebagai pilar ekonomi desa.

6. **SAE Pendapatan Keluarga : Koperasi Desa Merah Putih**

Selain itu, program ini juga terhubung dengan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Sinergi ini menekankan pentingnya menilai dan memantau kinerja koperasi agar sesuai dengan standar kelembagaan dan

peraturan, sehingga koperasi dapat berperan optimal dalam peningkatan pendapatan keluarga.

7. **SAE Pendapatan Keluarga : Koperasi Desa Merah Putih**

Program ini juga dikaitkan dengan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Keterkaitan ini memperlihatkan strategi jangka panjang, yaitu meningkatkan kapasitas SDM koperasi melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan manajerial. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi juga memiliki kualitas pengelolaan yang mumpuni.

8. **SAE Kesempatan Kerja : Membangun Perwilayahan Industri**

Program ini berhubungan dengan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Hubungan ini menegaskan strategi pengembangan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, penyerap tenaga kerja, sekaligus penggerak pemerataan pembangunan ekonomi daerah.

9. **SAE Kesempatan Kerja : Membangun Perwilayahan Industri**

Program prioritas ini juga berkorelasi dengan Program Pengendalian Izin Usaha Industri. Keterkaitannya terletak pada upaya menjaga iklim investasi dan perindustrian yang sehat melalui tata kelola izin usaha industri yang transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan perwilayahan industri.

**Tabel 5.** T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Probolinggo

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | 17.921.354.063,93 | 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | 18.046.354.063,93 |
| | 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 17.619.504.063,93 | 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 17.619.504.063,93 |
| | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 77 | 17.619.504.063,93 | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 77 | 17.619.504.063,93 |
| | 2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 176.195.040,64 |
| | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yangdisusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 20 Dokumen | 8.000.000,00 | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yangdisusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | 176.195.040,64 |
| | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 11 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 105.717.024,38 |
| | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 0 | 4.000.000,00 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | 105.717.024,38 |
| | 2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 70.478.016,26 |
| | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 11 Laporan | 4.000.000,00 | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 11 | 70.478.016,26 |
| | 2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 12.333.652.844,74 |
| | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 19 Dokumen | 14.538.349.965,93 | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 120 | 12.333.652.844,74 |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 19 | |
| | 2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 12.210.316.316,29 |
| | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 120 Orang/bulan | 14.534.349.965,93 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 120 | 12.210.316.316,29 |

***Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian***

***Kabupaten Probolinggo***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 123.336.528,45 |
| | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 19 Laporan | 4.000.000,00 | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 19 | 123.336.528,45 |
| | 2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 88.097.520,32 |
| | Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 Dokumen | 4.000.000,00 | Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | 88.097.520,32 |
| | 2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 88.097.520,32 |
| | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 Laporan | 4.000.000,00 | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | 88.097.520,32 |
| | 2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | 2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | 88.097.520,32 |
| | Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 21 Dokumen | 4.000.000,00 | Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 19 | 88.097.520,32 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tepat waktu | | | | tepat waktu | | | |
| | 2.17.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 2.17.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | 88.097.520,32 |
| | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 19 Dokumen | 4.000.000,00 | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 19 | 88.097.520,32 |
| | 2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 528.585.121,92 |
| | Prosentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 100 % | 67.513.000,00 | Prosentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 100 | 528.585.121,92 |
| | 2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 528.585.121,92 |
| | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 100 Paket | 67.513.000,00 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 100 | 528.585.121,92 |
| | 2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 352.390.081,28 |
| | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 40 | 352.390.081,28 |
| | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 50 % | 0,00 | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Unit) | | | | (Unit) | | |
| | 2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 176.195.040,64 |
| | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 40 Unit | 0,00 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 40 | 176.195.040,64 |
| | 2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 176.195.040,64 |
| | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 Unit | 0,00 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 176.195.040,64 |
| | 2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.523.900.812,79 |
| | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | - | 2.932.016.098,00 | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 3.523.900.812,79 |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | yang Disediakan (Laporan) | | | | yang Disediakan (Laporan) | | |
| | 2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 352.390.081,28 |
| | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 Laporan | 108.445.730,00 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 352.390.081,28 |
| | 2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 176.195.040,64 |
| | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 Laporan | 3.885.000,00 | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 176.195.040,64 |
| | 2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.995.315.690,87 |
| | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 Laporan | 2.819.685.368,00 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 2.995.315.690,87 |
| | 2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 528.585.121,92 |
| | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak | - | 65.625.000,00 | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak | 12 | 528.585.121,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dan Perizinannya (Unit) | | | | dan Perizinannya (Unit) | | |
| | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 12 | |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 12 | |
| | 2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 211.434.048,77 |
| | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 12 Unit | 52.635.000,00 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 12 | 211.434.048,77 |
| | 2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 158.575.536,58 |
| | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 12 Unit | 12.990.000,00 | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 12 | 158.575.536,58 |
| | 2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | | | | 2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | | | 158.575.536,57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bangunan Lainnya | | | | Bangunan Lainnya | | | |
| | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit) | 12 Unit | 0,00 | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit) | 12 | 158.575.536,57 |
| | 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | | 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | 125.000.000 |
| | Persentase Koperasi yang dikeluarkan persetujuan ijin usaha | Persentase koperasi yang telah memiliki ijin USP (%) | **0** | **0** | Persentase Koperasi yang dikeluarkan persetujuan ijin usaha | Persentase koperasi yang telah memiliki ijin USP (%) | 94 | 125.000.000 |
| | 2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 125.000.000 |
| | Jumlah Koperasi yang dikeluarkan persetujuan ijin usaha Simpan Pinjam | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | **0** | **0** | Jumlah Koperasi yang dikeluarkan persetujuan ijin usaha Simpan Pinjam | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 30 | 125.000.000 |
| | 2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | | | | 2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk | | | 125.000.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | **0** | **0** | Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 30 | 125.000.000 |
| | 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | 23.900.000 |
| | Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa | Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (%) | | 23.900.000,00 | Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa | Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (%) | 82 | 23.900.000 |
| | 2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | 23.900.000 |
| | Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | 82 % | 23.900.000,00 | Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | 20 | 23.900.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha) | | | | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha) | 20 | |
| | 2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | 2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | 11.950.000 |
| | Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha) | 40 Unit Usaha | 11.100.000,00 | Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha) | 20 | 11.950.000 |
| | 2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | 11.950.000 |
| | Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | 30 0 | 12.800.000,00 | Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | 20 | 11.950.000 |
| | 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | 11.200.000 |
| | Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya | Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya (%) | | 11.200.000,00 | Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya | Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya (%) | 92 | 11.200.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | | | | 2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | | | 11.200.000 |
| | Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 82 % | 11.200.000,00 | Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 20 | 11.200.000 |
| | 2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | 2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | 11.200.000 |
| | Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 40 Unit Usaha | 11.200.000,00 | Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 20 | 11.200.000 |
| | 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | 55.560.000 |
| | Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan | Persentase Kualitas Koperasi yang meningkat kapasitas SDMnya (%) | | **55.560.000,00** | Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan | Persentase Kualitas Koperasi yang meningkat kapasitas SDMnya (%) | 75 | 55.560.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 55.560.000 |
| | Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | 25 % | 55.560.000,00 | Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | 120 | 55.560.000 |
| | 2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | 2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | 55.560.000 |
| | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | 240 Orang | 55.560.000,00 | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | 120 | 55.560.000 |
| | 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | 31.540.000 |
| | jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi | Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya (%) | | **31.540.000,00** | jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi | Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya (%) | 25 | 31.540.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 31.540.000 |
| | jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 35 Unit Usaha | 31.540.000,00 | jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 20 | 31.540.000 |
| | 2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | | | 31.540.000 |
| | Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 35 Unit Usaha | 31.540.000,0 | Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 20 | 31.540.000 |
| | 2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | **0** | **0** | 2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | 150.000.000 |
| | Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang KeanggotaannyaDaerah KabupatenKota | Jumlah Koperasi yang telah Difasilitasi Kemitraannya | **0** | **0** | Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang KeanggotaannyaDaerahKabupatenKota | Jumlah Koperasi yang telah Difasilitasi Kemitraannya | 170 | 150.000.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | 174.000.000 |
| | Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Peresentase UM yang meningkat omzetnya (%) | | | Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Peresentase UM yang meningkat omzetnya (%) | 5 | 174.000.000 |
| | 2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | 2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | 174.000.000 |
| | Peresentase Usaha Mikro yang meningkat omzetnya | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) | 700 Unit Usaha | 174.000.000,00 | Peresentase Usaha Mikro yang meningkat omzetnya | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) | 60 | 174.000.000 |
| | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang) | | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang) | 250 | |
| | | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 75 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) | | | | dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) | | |
| | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) | | | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) | 60 | |
| | | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) | | | | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) | 300 | |
| | 2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | | 2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | 30.450.000 |
| | Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) | 115 Unit Usaha | 4.800.000,00 | Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) | 60 | 30.450.000 |
| | 2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | 2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | 21.750.000 |
| | Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) | 8800 Unit Usaha | 4.800.000,00 | Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) | 300 | 21.750.000 |
| | 2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | 2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | 52.200.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) | 120 Unit Usaha | 154.800.000,00 | Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) | 60 | 52.200.000 |
| | 2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | 2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | 17.400.000 |
| | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) | 150 Orang | 4.800.000,00 | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) | 75 | 17.400.000 |
| | 2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | 2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | 52.200.000 |
| | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang) | 450 Orang | 4.800.000,00 | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang) | 250 | 52.200.000 |
| | 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | 5.650.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah UM yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil | Persentase usaha mikro yang meningkat Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil (%) | | | Jumlah UM yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil | Persentase usaha mikro yang meningkat Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil (%) | 0,10 | 5.650.000 |
| | 2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | 2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | 5.650.000 |
| | Jumlah UM yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) | 3 Unit Usaha | 5.650.000,00 | Jumlah UM yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) | 40 | 5.650.000 |
| | 2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | 2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | 5.650.000 |
| | Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) | 75 Unit Usaha | 5.650.000,00 | Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) | 40 | 5.650.000 |
| | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | | | **1.838.300.000,00** | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | | | 1.838.300.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERDAGANGAN | | | | PERDAGANGAN | | | |
| | 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | 20.000.000 | 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | 20.000.000 |
| | Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang direkomendasikan | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha (%) | 20 | 20.000.000 | Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang direkomendasikan | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha (%) | 20 | 20.000.000 |
| | 3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | 3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | 20.000.000 |
| | Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen) | 5 Unit Usaha | 20.000.000,00 | Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen) | 5 | 20.000.000 |
| | 3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | 3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | 20.000.000 |
| | Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen) | 5 Dokumen | 20.000.000,00 | Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen) | 5 | 20.000.000 |
| | 3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | 15.000.000 |
| | Meningkatnya Penjual dan Penyimpan Bahan | Jumlah tempat penjualan dan penyimpanan Bahan | - | 0,00 | Meningkatnya Penjual dan Penyimpan Bahan | Jumlah tempat penjualan dan penyimpanan Bahan | 24 | 15.000.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Berbahaya yang berizin | Berbahaya | | | Berbahaya yang berizin | Berbahaya | | |
| | 3.30.02.2.06.0003 - PengawasanDistribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupunProdusen B2 (P-B2) | | | | 3.30.02.2.06.0003 - PengawasanDistribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupunProdusen B2 (P-B2) | | | 15.000.000 |
| | Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan PelabelanBahanBerbahayaTerhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Banyaknya Penjual dan Penyimpan Bahan Berbahaya | 0 Laporan | 0,00 | Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan PelabelanBahanBerbahayaTerhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Banyaknya Penjual dan Penyimpan Bahan Berbahaya | 24 | 15.000.000 |
| | 3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | | | | 3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | | | 10.000.000 |
| | Meningkatnya pengajuan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) | Jumlah Surat Keterangan Asal yang diterbitkan | - | 0,00 | Meningkatnya pengajuan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) | Jumlah Surat Keterangan Asal yang diterbitkan | 1 | 10.000.000 |
| | 3.30.02.2.07.0001 – Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | | | 3.30.02.2.07.0001 – Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | | 10.000.000 |
| | Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | 0 Dokumen | 0,00 | Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | 1 | 10.000.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Keterangan Asa | | | | Keterangan Asa | | | |
| | 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | 490.000.000 |
| | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi | Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar SNI (%) | | 490.000.000 | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi | Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar SNI (%) | 11 | 490.000.000 |
| | 3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | 367.500.000 |
| | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 5 Unit | 445.000.000,00 | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 3 | 367.500.000 |
| | 3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | 367.500.000 |
| | Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 35 Unit | 445.000.000,00 | Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 3 | 367.500.000 |
| | 3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah | | | | 3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah | | | 122.500.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kerjanya | | | | Kerjanya | | | |
| | Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 35 pengelola | 45.000.000,00 | Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 20 | 122.500.000 |
| | 3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | 122.500.000 |
| | Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 35 Dokumen | 45.000.000,00 | Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 20 | 122.500.000 |
| | 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | 1.025.000.000 | 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | 1.025.000.000 |
| | Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan | Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil (%) | | | Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan | Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil (%) | 61 | 1.025.000.000 |
| | 3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | 3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | 820.000.000 |
| | Jumlah Barang Kebutuhan | Jumlah Laporan Pemantauan | 11 komodit | 1.025.000.000,00 | Jumlah Barang Kebutuhan | Jumlah Laporan Pemantauan | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan | Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan) | as | | Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan | Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan) | 365 | 820.000.000 |
| | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 5 | |
| | 3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | 3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | 82.000.000 |
| | Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan) | 365 Laporan | 25.000.000,00 | Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan) | 365 | 82.000.000 |
| | 3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | 738.000.000 |
| | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 | 5 Laporan | 1.000.000.000,00 | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 | 5 | 738.000.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | | | dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | | |
| | 3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 205.000.000 |
| | Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) | 72 kali | 0,00 | Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) | 72 | 205.000.000 |
| | 3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | 3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | 205.000.000 |
| | Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) | 72 Laporan | 0,00 | Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) | 72 | 205.000.000 |
| | 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | 50.450.000 |
| | Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi | Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah (%) | | **50.450.000,00** | Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi | Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah (%) | 88 | 50.450.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 50.450.000 |
| | Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) | 40 produk | 50.450.000,00 | Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) | 15 | 50.450.000 |
| | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) | 3 | |
| | 3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional | | | | 3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional | | | 42.882.500 |
| | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) | 25 Pelaku Usaha | 5.450.000,00 | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) | 15 | 42.882.500 |
| | 3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | 3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | 7.567.500 |
| | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) | 5 Pelaku Usaha | 45.000.000,00 | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) | 3 | 7.567.500 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | 2.850.000 |
| | Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku (%) | | 2.850.000,00 | Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku (%) | 95 | 2.850.000 |
| | 3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | 3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | 2.850.000 |
| | Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) | 50 % | 2.850.000,00 | Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) | 750 | 2.850.000 |
| | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | | | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | 4.000 | |
| | 3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | 3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | 2.622.000 |
| | Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | 8000 Unit | 2.850.000,00 | Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | 4.000 | 2.622.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | 3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | 228.000 |
| | Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) | 1500 Orang | 0,00 | Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) | 750 | 228.000 |
| | 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | 250.000.000 |
| | Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi | Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri (%) | | 250.000.000,00 | Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi | Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri (%) | 88 | 250.000.000 |
| | 3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | 3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | 250.000.000 |
| | Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM) | 40 produk | 250.000.000,00 | Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM) | 35 | 250.000.000 |
| | 3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di | | | | 3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di | | | 250.000.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tingkat Kabupaten/Kota | | | | Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| | Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM) | 40 UMKM | 250.000.000,00 | Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM) | 35 | 250.000.000 |
| | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | **8.706.959.800** | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 9.106.959.800 |
| | 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | 8.706.959.800 |
| | Draft Kebijakan Pembangunan Industri | Prosentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan (%) | | **8.706.959.800** | Draft Kebijakan Pembangunan Industri | Prosentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan (%) | 50 | 8.706.959.800 |
| | 3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | 3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | 8.706.959.800 |
| | % Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen) | 50 % | 8.706.959.800,00 | % Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen) | 1 | 8.706.959.800 |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) | | | | Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) | 3 | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) | 1 | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) | 2 | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen) | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen) | 1 | |
| | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | 1 | |
| | | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | 1 | |
| | 3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | 3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | 130.604.397 |
| | Tersusunnya Rencana | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokume | 0,00 | Tersusunnya Rencana | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | 1 | 130.604.397 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pembangunan Industri | (Dokumen) | n | | Pembangunan Industri | (Dokumen) | | |
| | 3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | 3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | 3.918.131.910 |
| | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen) | 1 Dokumen | 6.000.000.000,00 | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen) | 1 | 3.918.131.910 |
| | 3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | 130.604.397 |
| | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) | 1 Dokumen | 0,00 | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) | 1 | 130.604.397 |
| | 3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | 3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | 522.417.588 |
| | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan | 2 Dokume | 236.959.800,00 | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) | n | | dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) | 2 | 522.417.588 |
| | 3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | 3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | 3.831.062.312 |
| | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) | 3 Dokumen | 2.470.000.000,00 | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) | 3 | 3.831.062.312 |
| | 3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | 3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | 87.069.598 |
| | Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | 1 Dokumen | 0,00 | Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | 1 | 87.069.598 |
| | 3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota | | | | 3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota | | | 87.069.598 |
| | Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan | 1 Dokumen | 0,00 | Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan | 1 | 87.069.598 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | level Kabupaten/Kota | Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen) | | | Kabupaten/Kota | Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen) | | |
| | 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | 200.000.000 |
| | Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya | Persentase Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan (%) | | | Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya | Persentase Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan (%) | 40 | 200.000.000 |
| | 3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 0,00 | 3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 |
| | Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman | 50 Unit Usaha | 0,00 | Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman | 50 | 200.000.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kabupaten/Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya | Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) | | | Kabupaten/Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya | Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) | | |
| | | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) | | | | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) | 50 | |
| | 3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | 80.000.000 |
| | Terselenggaranya Koordinasi dan | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap | 50 Dokumen | 0,00 | Terselenggaranya Koordinasi dan | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) | | | Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) | 50 | 80.000.000 |
| | 3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | 3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | 120.000.000 |
| | Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko | 50 Dokumen | 0,00 | Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) | | | perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) | 50 | 120.000.000 |
| | 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | 200.000.000 |
| | Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS | Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas (%) | | 0,00 | Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS | Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas (%) | 25 | 200.000.000 |
| | 3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 |
| | Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi | 130 Unit Usaha | 0,00 | Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS | Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen) | | | Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS | Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen) | 5 | 200.000.000 |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) | 10 | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen) | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen) | 20 | |
| | 3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | 3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | 80.000.000 |
| | Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota | 10 Dokumen | 0,00 | Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota | 10 | 80.000.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) | | | Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) | | |
| | 3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | 3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | 60.000.000 |
| | Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen) | 5 Dokumen | 0,00 | Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen) | 5 | 60.000.000 |
| | 3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | 3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | 60.000.000 |
| | Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen) | 20 Dokumen | 0,00 | Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen) | 20 | 60.000.000 |

# BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

**Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 memiliki beberapa fokus utama, yaitu :**

- Pengembangan Koperasi Sektor Produksi: Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas koperasi produksi, serta memperkuat koperasi sebagai aggregator dan konsolidator UMKM.

- Penguatan Pengawasan Koperasi: Meningkatkan efektivitas pengawasan koperasi dan pembentukan Otoritas Pengawasan Koperasi (OPK).

- Pengembangan Kewirausahaan: Integrasi layanan usaha dan pengembangan wirausaha tematik, peningkatan kapasitas usaha melalui riset dan penerapan teknologi, serta sertifikasi usaha.

- Peningkatan Akses dan Inovasi Pembiayaan Usaha: Memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi, serta pengembangan produk pembiayaan inovatif.

- Fasilitasi Akses Pemasaran dan Kemitraan: Menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri dan pemanfaatan Sistem Informasi Data Tunggal koperasi dan UMKM.

- Digitalisasi Layanan Pengembangan Usaha: Meningkatkan efisiensi operasional koperasi dan UMKM melalui digitalisasi.

Selain itu, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki beberapa target yang ingin dicapai, yaitu [1]:

- Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB: 10% pada tahun 2045

- Proporsi Jumlah UKM: 5%

- Rasio Kewirausahaan: 8%

Dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki 12 program prioritas, antara lain [3]:

- Supply Bahan Pokok untuk Makan Bergizi Gratis (MBG)

- Penyaluran Pupuk untuk Petani

- Penyaluran Beras Bersubsidi

- Penguatan Produksi Tekstil

- Supply Bahan Baku Perumahan

- Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat

- Produksi Minyak untuk Rakyat

- Produksi Energi Biomassa

- Supply Susu Nasional

- Pengembangan Koperasi Ojek Online

- Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD)

- Penghapusan Buku dan Hapus Tagih Kredit Usaha Tani (KUT)

1) Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2) Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3) Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4) Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM);
5) Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kementerian Koperasi dan UKM memiliki beberapa fokus utama yang mendukung Renstra Kementerian Perdagangan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, antara lain:

- Pengembangan Koperasi Sektor Produksi: Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas koperasi produksi, serta memperkuat koperasi sebagai aggregator dan konsolidator UMKM.

- Penguatan Pengawasan Koperasi: Meningkatkan efektivitas pengawasan koperasi dan pembentukan Otoritas Pengawasan Koperasi (OPK).

- Pengembangan Kewirausahaan: Integrasi layanan usaha dan pengembangan wirausaha tematik, peningkatan kapasitas usaha melalui riset dan penerapan teknologi, serta sertifikasi usaha.

- Peningkatan Akses dan Inovasi Pembiayaan Usaha: Memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi, serta pengembangan produk pembiayaan inovatif.

- Fasilitasi Akses Pemasaran dan Kemitraan: Menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri dan pemanfaatan Sistem Informasi Data Tunggal koperasi dan UMKM.

- Digitalisasi Layanan Pengembangan Usaha: Meningkatkan efisiensi operasional koperasi dan UMKM melalui digitalisasi.

Dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki target yang ingin dicapai, seperti:

- Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB: 10% pada tahun 2045

- Proporsi Jumlah UKM: 5%

- Rasio Kewirausahaan: 8%

Selain itu, ada beberapa strategi pemerintah untuk pengembangan UMKM, antara lain [1]:

- Membagi Fokus Pemberdayaan UMKM: Pendekatan high touch pada UMKM yang dapat menjadi katalisator bagi perekonomian nasional, dan pendekatan low touch untuk usaha mikro dan subsisten.

- Mendorong UMKM untuk Menggunakan Teknologi Modern: Melalui korporatisasi petani dan nelayan, serta program Rumah Produksi Bersama.

- Fokus pada Sektor Unggulan: Seperti agriculture, aquaculture, dan creative economy.

- Mendukung Research and Development: Yang dapat dimanfaatkan UMKM.

- Merumuskan Skema Kemitraan: Antara usaha mikro kecil dengan usaha mikro besar.

- Memaksimalkan Kebijakan Alokasi Belanja Pemerintah: Untuk mendukung pengembangan UMKM.

- Mendorong Akses Perbankan: Bagi UMKM melalui skema credit scoring dan Initial Public Offering (IPO).

**Telaahan Renstra Kementrian Perdagangan**

Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 berfokus pada beberapa aspek strategis untuk mencapai visi "Indonesia Emas 2045". Berikut adalah beberapa tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai:

Prioritas Nasional

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa

- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas

- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan

- Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam

- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi

- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi

- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya

Sasaran Utama Pembangunan Nasional
- Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5%
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59%
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, mencapai 8% pada tahun 2029

Kebijakan Kementerian Perdagangan

- Meningkatkan kinerja ekspor non-migas secara berkualitas
- Menguatkan pasar dalam negeri dan menjaga ketersediaan bahan pokok
- Mengembangkan industri berbasis sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Renstra Ditjen PEN 2025-2029

- Meningkatkan target kinerja kegiatan utama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
- Penyusunan informasi pasar ekspor (market intelligence)
- Pengembangan produk ekspor
- Pelayanan Inaexport
- Penyelenggaraan promosi dagang

Kementerian Perdagangan juga melakukan penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) dan Rencana Strategis (Renstra) untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh masukan, koreksi, dan inisiatif dalam menentukan langkah strategis Kementerian Perdagangan ke depan .

**Urusan perdagangan yang mendukung Renstra Kementerian Perdagangan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut**:

- Pengembangan Ekspor Nasional:
- Meningkatkan kinerja ekspor non-migas secara berkualitas
- Mengembangkan industri berbasis sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- Penyusunan informasi pasar ekspor (market intelligence)
- Pengembangan produk ekspor
- Pelayanan Inaexport
- Penyelenggaraan promosi dagang

- Penguatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK):
- Mendukung peningkatan ekspor komoditas dan menjaga inflasi
- Pembentukan harga acuan komoditas strategis Indonesia
- Penguatan pengawasan berbasis digital
- Optimalisasi dan penguatan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

- Peningkatan Kapasitas dan Organisasi/Sumber Daya Manusia (SDM):

- Meningkatkan literasi berkelanjutan
- Menguatkan kolaborasi dan membangun orkestra yang baik dengan seluruh kementerian dan lembaga termasuk daerah

- Prioritas Nasional:
- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan

Renstra Kementerian Perdagangan disusun untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025-2029. Langkah-langkah strategis ini dirancang untuk memperoleh masukan, koreksi, dan inisiatif dalam menentukan langkah strategis Kementerian Perdagangan ke depan .

**Telaahan Renstra Kementrian Perindustrian**

Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting. Berikut beberapa prioritas nasional yang relevan dengan Kementerian Perindustrian :

- Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam: Kementerian Perindustrian dapat memfokuskan pada hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam.
- Peningkatan Daya Saing Industri: Kementerian Perindustrian dapat meningkatkan daya saing industri melalui pengembangan teknologi dan inovasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Pengembangan Infrastruktur: Kementerian Perindustrian dapat bekerja sama dengan kementerian lain untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengembangan industri, seperti infrastruktur transportasi dan energi.
- Pengembangan Kewirausahaan: Kementerian Perindustrian dapat mempromosikan kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program-program pelatihan dan pendanaan.
- Penguatan Reformasi Birokrasi: Kementerian Perindustrian dapat memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan industri.

Dalam RPJMN 2025-2029, terdapat beberapa target yang ingin dicapai, seperti [1]:
- Pertumbuhan Ekonomi: Mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029.
- Penurunan Kemiskinan: Menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5% pada tahun 2029.
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Meningkatkan indeks modal manusia (IMM) menjadi 0,59.

Dengan demikian, Kementerian Perindustrian dapat menyusun strategi dan program-program yang sejalan dengan prioritas nasional dan target RPJMN 2025-2029 untuk meningkatkan pembangunan industri di Indonesia.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan yang ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Tujuan utama perangkat daerah ini adalah Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa sasaran strategis yang terukur dengan indikator kinerja utama, sehingga dapat memudahkan pemantauan capaian pembangunan dari kondisi awal hingga target akhir periode Renstra.

Indikator utama tujuan ini adalah Persentase PDRB Perdagangan dan Rasio PDRB Industri Pengolahan. Pada kondisi awal (n-2), persentase PDRB perdagangan tercatat sebesar 4,11 persen, dengan target capaian yang meningkat secara bertahap hingga 7,46 persen pada akhir periode (n+4). Demikian pula, rasio PDRB industri pengolahan yang pada kondisi awal 27,19 persen diarahkan untuk naik secara gradual hingga mencapai 27,48 persen pada akhir periode. Pergerakan indikator ini mencerminkan arah pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada penguatan sektor perdagangan dan industri pengolahan sebagai penopang utama struktur ekonomi.

**Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator :**

1. **Persentase PDRB Perdagangan**
   - **Definisi Operasional** : Menggambarkan kontribusi sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Probolinggo pada harga konstan atau berlaku. Indikator ini **menunjukkan** sejauh mana sektor perdagangan berperan dalam perekonomian daerah.
   - **Formula Perhitungan :**

$$\text{Persentase PDRB Perdagangan} = \frac{\text{PDRB Perdagangan}}{\text{PDRB total}} x\ 100\%$$

2. **Rasio PDRB Industri Pengolahan**
   - **Definisi Operasional :** Rasio ini menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Probolinggo. Indikator ini

menjadi tolok ukur kekuatan sektor industri dalam struktur ekonomi daerah.

- **Formula Perhitungan :**

$$\text{Rasio PDRB Industri Pengolahan} = \frac{\text{PDRB Industri Pengolahan}}{\text{PDRB total}} x\ 100\%$$

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis. Sasaran pertama adalah Meningkatnya omzet koperasi dengan indikator Persentase pertumbuhan omzet koperasi. Dari kondisi awal 7,53 persen, target capaian ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 10,5 persen pada akhir periode. Sasaran kedua adalah Meningkatnya omzet usaha mikro, dengan indikator Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, yang pada kondisi awal sebesar 1,97 persen diarahkan meningkat menjadi 3,25 persen pada akhir periode. Kedua sasaran ini mencerminkan fokus pada penguatan usaha berbasis masyarakat dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

**Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator :**

1. **Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi**
   - **Definisi Operasional :** Mengukur peningkatan omzet (volume usaha) koperasi di Kabupaten Probolinggo dalam satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini menggambarkan perkembangan usaha koperasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.
   - **Formula Perhitungan :**

$$\%\text{Pertumbuhan Omzet Koperasi} = \frac{\text{Omzet Koperasi (n)} - \text{Omzet Koperasi (n} - 1)}{\text{Omzet Koperasi (n} - 1)} x\ 100\%$$

2. **Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro**
   - **Definisi Operasional :** Menunjukkan peningkatan omzet usaha mikro di Kabupaten Probolinggo setiap tahun. Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan pembinaan usaha mikro dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing.
   - **Formula Perhitungan :**

$$\%\text{Pertumbuhan Omzet UM} = \frac{\text{Omzet UM (n)} - \text{Omzet UM (n} - 1)}{\text{Omzet UM (n} - 1)} x\ 100\%$$

Sasaran berikutnya adalah Meningkatnya PDRB sub sektor perdagangan dan Meningkatnya PDRB sub sektor industri. Indikator yang digunakan adalah

Persentase kontribusi PDRB sub sektor perdagangan yang dari kondisi awal 13 persen ditargetkan meningkat menjadi 16 persen, serta Persentase kontribusi PDRB sub sektor industri yang dari kondisi awal 26,5 persen ditargetkan naik menjadi 29,5 persen. Kedua sasaran ini menekankan peran strategis perdagangan dan industri dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kokoh.

3. **Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Perdagangan**
   - **Definisi Operasional :** Persentase ini menunjukkan besarnya kontribusi sub sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Probolinggo. Indikator ini menjadi ukuran daya dorong sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
   - **Formula Perhitungan:**

$$\%\ \text{Kontribusi PDRB Perdagangan} = \frac{\text{Kontribusi PDRB sektor Perdagangan}}{\text{PDRB total}} x\ 100\%$$

4. **Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Industri**
   - **Definisi Operasional :** Menggambarkan peran sub sektor industri pengolahan dalam membentuk total PDRB Kabupaten Probolinggo. Indikator ini memperlihatkan kekuatan sektor industri dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
   - **Formula Perhitungan :**

$$\%\ \text{Kontribusi PDRB Industri} = \frac{\text{Kontribusi PDRB sektor Industri}}{\text{PDRB total}} x\ 100\%$$

Selain tujuan utama, perangkat daerah ini juga menetapkan tujuan kedua yaitu Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah. Tujuan ini diarahkan untuk memperbaiki kualitas manajemen internal organisasi agar semakin efektif, akuntabel, dan transparan. Indikator yang digunakan adalah Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah dengan kondisi awal 1,22 persen, dan ditargetkan meningkat secara konsisten sebesar 1 persen setiap tahun hingga akhir periode. Dengan tujuan ini, diharapkan perangkat daerah mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik sekaligus mendukung keberhasilan pencapaian tujuan utama pembangunan ekonomi daerah.

**Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator**

5. **Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah**
   - **Definisi Operasional :** Mengukur peningkatan nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) perangkat daerah setiap tahun. Indikator ini mencerminkan perbaikan dalam tata kelola birokrasi, perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja.
   - **Formula Perhitungan :**

$$Nilai\ Akhir\ AKIP\ PD = (Nilai\ Perencanaan \times 0.30) + (Nilai\ Pengukuran \times 0.10) + (Nilai\ Pelaporan \times 0.15) + (Nilai\ Evaluasi\ Internal \times 0.10) + (Nilai\ Capaian\ Kinerja \times 0.35)$$

## 3.2 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat kabupaten. Pada Tahun 2026, Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo akan melaksanakan 17 program, Dari 17 program tersebut, diturunkan menjadi 28 kegiatan dan 53 subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. sebagai berikut:

**I.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten:**

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja:**

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:**

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:**

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**1. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:**

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**:**
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

**2. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah:**

- Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

**1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**II. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI :**

**1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota :**

- Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

**III. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi :**

**1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota :**

- Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

**IV. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian :**

1. **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota :**
   - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2. **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota :**
   - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro

**V. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi :**

1. **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota :**
   - Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

**VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) :**

1. **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan :**
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
   - Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
   - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

**VII. Program Pengembangan UMKM :**

1. **Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil :**
   - Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

**VIII. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan:**

1. **Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang:**
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

**IX. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan:**

**1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan:**

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

**2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya:**

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

**X. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting:**

**1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota:**

- Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

**2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:**

- Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

**XI. Program Pengembangan Ekspor:**

**1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:**

- Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional
- Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

**XII. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen:**

**1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan:**

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

**XIII. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri:**

**1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri:**

- Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

**XIV. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri:**

**1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota:**

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota

**XV. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota:**

**1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota:**

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

**XVI. Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional:**

**1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota:**

- Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
- Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
- Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

**Tabel 6.** T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. PROBOLINGGO

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN** | | | | | | **28.466.613.863,93** | | | | | | | **0,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **17.921.354.063,93** | | | | | | | **0,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **17.921.354.063,93** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **17.619.504.063,93** | | | | | | - | **0,00** | |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumenPerencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yangdisusun dan dilaporkan tepat waktu* | - | | | 20 Dokumen | 8.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *0* | | | | 10 0 | 4.000.000,00 | - | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 11 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan* | - | | | 19 Dokumen | 14.538.349.965,93 | | | - | 2. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 120 Orang/bulan | 14.534.349.965,93 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 19 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu* | - | | | 4 Dokumen | 4.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan tepat waktu* | - | | | 21 Dokumen | 4.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 19 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase pemenuhan administrasi umum PD* | - | | | 100 % | 67.513.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 100 Paket | 67.513.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD* | - | | | 50 % | 0,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 40 Unit | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.932.016.098,00 | | | - | 2. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 108.445.730,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 2. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 3.885.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 2.819.685.368,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 65.625.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 12 Unit | 52.635.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12.990.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | | **23.900.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | *Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa* | - | | | 82 % | 23.900.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi* | | | | 40 Unit Usaha | 11.100.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *0* | | | | 30 0 | 12.800.000,00 | - | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3. | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | | | **11.200.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya* | - | | | 82 % | 11.200.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan* | | | | 40 Unit Usaha | 11.200.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 4. | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | | **55.560.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan* | - | | | 25 % | 55.560.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | | | | 240 Orang | 55.560.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 5. | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | | **31.540.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi* | - | | | 35 Unit Usaha | 31.540.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 35 Unit Usaha | 31.540.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 6. | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | **174.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | *Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan* | - | | | 700 Unit Usaha | 174.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro* | | | | 115 Unit Usaha | 4.800.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan* | | | | 8800 Unit Usaha | 4.800.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro* | | | | 120 Unit Usaha | 154.800.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro* | | | | 150 Orang | 4.800.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan* | | | | 450 Orang | 4.800.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 7. | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | **5.650.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | *Jumlah Usaha mikro yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil* | - | | | 3 Unit Usaha | 5.650.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi* | | | | 75 Unit Usaha | 5.650.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **10.545.259.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **1.838.300.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | | | **20.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | *Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan* | - | | | 5 Unit Usaha | 20.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang* | | | | 5 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.06 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)* | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.07 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | - | - | | | - | 0,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.07.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | | **490.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | *Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi* | - | | | 5 Unit | 445.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 35 Unit | 445.000.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | *Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaan* | - | | | 35 pengelola | 45.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 35 Dokumen | 45.000.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3. | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | **1.025.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | *Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan* | - | | | 11 komoditas | 1.025.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan* | | | | 365 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 5 Laporan | 1.000.000.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan* | - | | | 72 kali | 0,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%* | | | | 72 Laporan | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 4. | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | | | **50.450.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi* | - | | | 40 produk | 50.450.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang* | | | | 25 Pelaku Usaha | 5.450.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan* | | | | 5 Pelaku Usaha | 45.000.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 5. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | | **2.850.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | *Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang* | - | | | 50 % | 2.850.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang* | | | | 8000 Unit | 2.850.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | | | | 1500 Orang | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 6. | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | | **250.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | *Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi* | - | | | 40 produk | 250.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi* | | | | 40 UMKM | 250.000.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **8.706.959.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | **8.706.959.800,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | *% Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan* | - | | | 50 % | 8.706.959.800,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri* | | | | 2 Dokumen | 236.959.800,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | | | | 3 Dokumen | 2.470.000.000,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0008 | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | | | | | **0,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya* | - | | | 50 Unit Usaha | 0,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | | | | 50 Dokumen | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | | | | 50 Dokumen | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3. | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | | | | **0,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS* | - | | | 130 Unit Usaha | 0,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)* | | | | 10 Dokumen | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi<br><br>dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas* | | | | 5 Dokumen | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas* | | | | 20 Dokumen | 0,00 | Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

# BAB IV

# PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan PerindustrianKabupaten Probolinggo ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan PerindustrianKabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) juga memperhatikan program dan prioritas sehingga OPD akan tepat sasaran dalam menjalankan Rencana Kerja 1 (satu) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, dibutuhkan peran aktif para stekeholder dan CSR sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Kerja yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan OPD , sedangkan untuk realisasi dari Program- program tersebut erat hubungan dengan sumber pendanaan baik dari APBD maupun APBN dan tidak lepas dari kemampuan aparatur pelaksana program serta sarana dan prasarana yang tersedia dan partisipasi semua pihak yang terkait.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Rencana Kerja ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan PerindustrianKabupaten Probolinggo, sehingga penetapan prioritas pembangunan pembangunan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi OPD dapat terkoordinir, terintegrasi dan sinergis, serta berkelanjutan, dengan semua bidang-bidang yang ada di maupun sesama OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Probolinggo,  Juli 2025

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Probolinggo

**TAUPIK ALAMI, S.Sos, M.Si**
Pembina Tk. I
NIP. 19700108 199602 1 001

# RENCANA STRATEGIS

## TAHUN 2025-2029

## DINAS PERIKANAN

### PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah telah disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025-2029. Dimana hal ini merupakan salah satu tahap awal dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dalam masa kepemimpinan Bupati-wakil Bupati tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perikanan ini secara substansi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo, sedang untuk format dan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025.

Berikut kami sampaikan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 serta pihak-pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung.

Probolinggo, 26 September 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

ACHMAD ARUMAN, S.Sos, MM
Pembina Utama
NIP. 19670926 198809 1 001

# DAFTAR ISI

Halaman


| | | |
|---|---|---|
| KATA PENGANTAR ..... | | ii |
| DAFTAR ISI ..... | | iii |
| DAFTAR TABEL ..... | | v |
| DAFTAR GAMBAR ..... | | vi |
| BAB I | PENDAHULUAN ..... | 1 |
| 1.1 | Latar Belakang ..... | 1 |
| 1.2 | Landasan Hukum ..... | 10 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan ..... | 12 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan ..... | 14 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN ..... | 16 |
| 2.1 | Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan | 16 |
| 2.1.1 | Tugas , Fungsi dan Struktur Dinas Perikanan ..... | 16 |
| 2.1.2 | Sumber daya Perangkat Daerah ..... | 23 |
| 2.1.2.1 | Kondisi Kepegawaian Dinas Perikanan | 23 |
| 2.1.2.2 | Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perikanan ..... | 25 |
| 2.1.3 | Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan ... | 29 |
| 2.1.3.1 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Perikanan . | 29 |
| 2.1.3.2 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan ..... | 36 |
| 2.1.4 | Kelompok Sasaran Layanan ..... | 40 |
| 2.2 | Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perikanan ..... | 42 |
| 2.2.1 | Isu-isu Strategis ..... | 46 |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... | 49 |
| 3.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan ..... | 49 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.2 | Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan ……. | 52 |
| BAB IV | PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERIKANAN ……. | 58 |
| 4.1 | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan ……. | 58 |
| 4.2 | Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif…. | 61 |
| 4.3 | Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… | 75 |
| BAB V | PENUTUP ……. | 82 |
| 5.1 | Pokok-pokok Rencana Strategis Dinas Perikanan ……. | 82 |
| 5.2 | Kaidah Pelaksana Rencana Strategis Dinas Perikanan ……. | 82 |
| 5.3 | Pelaksanaan Pengendalian Rencana Strategis Dinas Perikanan ……. | 83 |
| 5.4 | Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Urusan Perikanan ….. | 83 |

# DAFTAR TABEL


| No Tabel | | Halaman |
|---|---|---|
| Tabel 2.1. | Jumlah ASN Dinas Perikanan berdasar gender ..... | 23 |
| Tabel 2.2 | Klasifikasi Tupoksi dan Pendidikan Pegawai..... | 24 |
| Tabel 2.3. | Daftar Aset Dinas Perikanan..... | 23 |
| Tabel 2.4. | Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Perikanan Kabupaten Probolinggo ..... | 32 |
| Tabel 2.11. | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan Perikanan Kabupaten Probolinggo ..... | 34 |
| Tabel 2.12. | SWOT Pelayanan Dinas Perikanan ..... | 38 |
| Tabel 2.13. | Teknik Menyimpulkan lsu Strategis PD..... | 43 |
| Tabel 3.1. | Cascading ..... | 52 |
| Tabel 3.2. | Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Probolinggo..... | 54 |
| Tabel 3.4. | Penahapan Renstra PD ..... | 55 |
| Tabel 3.5. | Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD ..... | 56 |
| Tabel 4.1. | Program PD Pemerintah Kabupaten Probolinggo ..... | 59 |
| Tabel 4.2. | Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ..... | 61 |
| Tabel 4.3. | Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah ..... | 75 |
| Tabel 4.4. | Indikator Kinerja Kunci..... ..... | 79 |
| Tabel 4.5. | Indikator Kinerja Utama PD..... ..... | 80 |

## DAFTAR GAMBAR


| No Gambar | | Halaman |
|---|---|---|
| Gambar 1. | Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo ..... | 17 |
| Gambar 2. | Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo ..... | 22 |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 Urusan Kelautan dan Perikanan maka Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo menyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2025-2029. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis sebagai tindak lanjut dari terpilihnya Kepala Daerah di tahun 2025, sehingga Kabupaten Probolinggo akan dipimpin Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 dengan membawa visi dan misi yang harus dilaksanakan selama kurun waktu 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen penting yang memuat arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273. Dalam upaya mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 Urusan Bidang Perikanan, maka Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo serta sebagai pedoman operasional perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan sektor perikanan di wilayah ini.

Dalam Inmendagri nomor 2 tahun 2025, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten

Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun.

Renstra Dinas Perikanan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada bidang perikanan Dinas Perikanan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perikanan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan bidang perikanan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Perikanan 2025-2029 terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang diawali dengan pertemuan dan pembahasan Kepala Dinas dan seluruh jajarannya, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pendampingan BAPELITBANGDA serta Verifikasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD 2025-2029, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Renstra Dinas Perikanan tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan

arah yang jelas bagi pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Probolinggo lima tahun ke depan, sekaligus menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan perikanan yang maju, berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Perikanan dan Gizi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perikanan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Dinas Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perikanan untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 2 tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan kepada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai

dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

3.2 Sasaran

3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program Prioritas pembangunan daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN
# PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
# DINAS PERIKANAN

## 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan

### 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;
5. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perikanan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI adalah sebagai berikut :

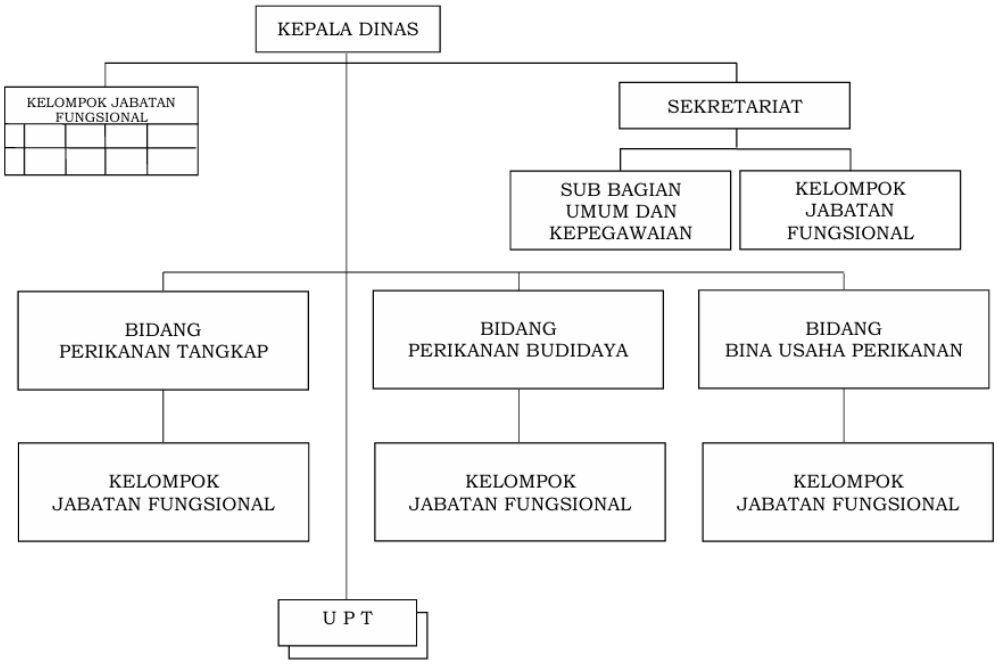


Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Perikanan
Kabupaten Probolinggo

1) Susunan organisasi Dinas Peeikanan terdiri dari :
   - ❖ Kepala Dinas;
   - ❖ Sekretariat membawahi :
     i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
     ii. Kelompok Jabatan Fungsional.
   - ❖ Bidang Perikanan Tangkap membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   - ❖ Bidang Perikanan Budidaya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   - ❖ Bidang Bina Usaha Perikanan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   - ❖ Kelompok Jabatan Fungsional;
   - ❖ UPT.
2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
5) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksana tugas jabatan fungsional.
6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
7) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

❖ **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perikanan**

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

a) perumusan kebijakan dibidang perikanan;
b) pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan;
c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan;
d) pelaksanaan administrasi dibidang perikanan;
e) pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

❖ **Tugas pokok dan fungsi Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

a) pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
b) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;
c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;

d) pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
e) pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
f) penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g) pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

❖ **Tugas dan Fungsi Bidang Dinas Perikanan**

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pemberdayaan nelayan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengelolaan data dan informasi sumberdaya ikan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perikanan tangkap;
b) pelaksanaan perencanaan, fasilitasi, koordinasi pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;
c) pelaksanaan perencanaan, fasilitasi, koordinasi pengembangan alternatif usaha nelayan;
d) pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
e) pelaksanaan perencanaan, koordinasi, rehabilitasi kawasan sentra nelayan;
f) pelaksanaan pengelolaan dokumen kapal perikanan;
g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

❖ **Tugas dan Fungsi Bidang Perikanan Budidaya**

Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan perikanan budidaya.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi

a) pengelolaan profil usaha perikanan budidaya;
b) perencanaan dan pengembangan usaha perikanan budidaya;
c) penyusunan rencana dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan budidaya;
d) pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
e) pengendalian jaminan mutu dan keamanan Perikanan perikanan budidaya;
f) pengembangan sistem produksi budidaya perikanan;
g) pengembangan sistem perbenihan perikanan;
h) pelaksanaan verifikasi pengajuan rekomendasi teknis perizinan usaha budidaya di daerah;
i) pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;
j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

❖ **Tugas dan Fungsi Bidang Bina Usaha Perikanan**

Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pembinaan usaha pengolahan, pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumberdaya perikanan.

a) pelaksanaan pembinaan tentang hukum dan peraturan perikanan;
b) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan serta pemasaran produk perikanan;
c) pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan data informasi usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
d) pelaksanaan perencanaan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
e) pelaksanaan pembinaan penanganan mutu dan diversifikasi hasil perikanan;
f) pelaksanaan perencanaan penerapan jaminan mutu dan keamanan produk olahan ikan;
g) pelaksanaan pembinaan penerapan standarisasi mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
h) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan akses pasar produk hasil perikanan;

i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

❖ **U P T**

Nomenklatur UPT urusan Perikanan adalah UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton dan UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau dimana Susunan Organisasi dan tupoksi UPT akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton mempunyai fungsi :
    a) penyusunan rencana kerja dan anggaran;
    b) pelaksanaan urusan ketatausahaan;
    c) Penatausahaan barang milik daerah, inventaris, barang habis pakai dan sarana prasarana lainnya;
    d) pelaksanaan transaksi jual beli ikan;
    e) pelaksanaan pemungutan retribusi;
    f) penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana;
    g) pelayanan terhadap nelayan maupun pedagang ikan;
    h) pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
    i) Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
    j) penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
    k) pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pelelangan ikan;
    l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Perikanan Budidaya Air

Tawar/Air Payau. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kerja dan anggaran
b) pelaksanaan urusan ketatausahaan;
c) Penatausahaan barang milik daerah, inventaris, barang habis pakai dan sarana prasarana lainnya;
d) pelaksanaan produksi benih dan pembesaran ikan;
e) pelayanan laboratorium kualitas air dan penyakit ikan;
f) pelaksanaan bimbingan teknis pembenihan dan pembesaran ikan;
g) pemasaran benih dan ikan konsumsi;
h) pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan benih ikan di masyarakat yang berasal dari UPT;
i) Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
j) penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
k) pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan perikanan budidaya;
l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

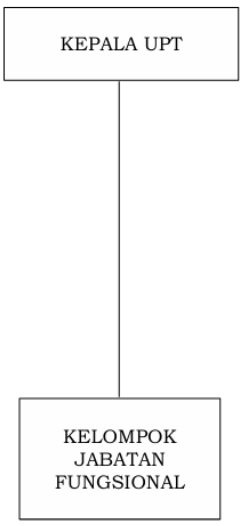


Gambar 2.
Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo

### 2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Pelaksanaan fungsi Dinas Perikanan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perikanan.

#### 2.1.2.1. Kondisi Kepegawaian Dinas Perikanan

Dalam melakukan tugas dan fungsinya selama tahun 2025, Dinas Perikanan dibantu oleh 34 karyawan/karyawati dengan status ASN dan 23 tenaga non ASN sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah ASN Dinas Perikanan berdasar gender

| No. | KEPEGAWAIAN | JUMLAH | GENDER | |
|---|---|---|---|---|
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 1 | PNS | 27 | 20 | 7 |
| 2 | PPPK | 7 | 6 | 1 |
| 3 | NON PNS | 23 | 19 | 4 |
| Jumlah | | 57 | 45 | 12 |

Sumber : Subag Kepegawaian DISKAN, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas pegawai adalah laki-laki (78,95%), sedangkan pegawai perempuan berjumlah 12 orang (21,05%). Komposisi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Dinas Perikanan masih didominasi laki-laki, sejalan dengan karakteristik sektor perikanan yang banyak membutuhkan tenaga lapangan.

Meskipun demikian, keberadaan pegawai perempuan tetap memegang peranan penting, terutama pada bidang administrasi, pengolahan data, serta layanan teknis tertentu. Keseimbangan kompetensi, pengalaman, dan keterampilan antarpegawai menjadi modal dasar bagi Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025–2029. Pegawai Dinas Perikanan dapat ditinjau dari klasifikasi pendidikan formal sebagai berikut:

Tabel 2.2. Klasifikasi Tupoksi dan Pendidikan Pegawai

| NO. | JABATAN | PENDIDIKAN | | | | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD | SMP | SMA | S1 | S2 | |
| 1. | Eselon II | | | | | 1 | **1** |
| 2. | Eselon III | | | | | 4 | **4** |
| 3. | Kasubag Umum dan Kepegawaian | | | | | 1 | **1** |
| 4. | JF Analis Akuakultur Muda | | | | 1 | | **1** |
| 5. | JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda | | | | 2 | | **2** |
| 6. | JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Muda | | | | 2 | | **2** |
| 7. | JF Analis Pasar Hasil Perikanan Muda | | | | | 1 | **1** |
| 8. | JF Pengelola Kesehatan Ikan Muda | | | | | 1 | **1** |
| 9. | JF Pengawas Perikanan Muda | | | | 1 | | **1** |
| 10. | Kepala UPT | | | | 1 | 1 | **2** |
| 11. | Bendahara | | | | 2 | | **2** |
| 12. | Analis Benih | | | | 1 | | **1** |
| 13. | Analis Perikanan Budidaya | | | | 1 | | **1** |
| 14. | Pengelola Data | | | 6 | 1 | | **7** |
| 15. | PPPK | | | | 7 | | **7** |
| 16. | NON PNS | 2 | 3 | 10 | 8 | | **23** |
| | **JUMLAH** | **2** | **3** | **16** | **17** | **9** | **57** |

Berdasarkan Tabel diatas didapatkan data bahwa pegawai dengan pendidikan S1 adalah kelompok terbesar (17 orang / 29,8%), diikuti oleh

SMA 16 orang (28,1%).Pegawai S2 berjumlah 9 orang (15,8%), umumnya menduduki jabatan struktural Eselon II dan III. Terdapat pegawai berpendidikan SD (2 orang) dan SMP (3 orang), terutama tenaga Non PNS.

Struktur Jabatan pada Dinas Perikanan yaitu Jabatan struktural: 1 Eselon II, 4 Eselon III, 1 Kasubag. Jabatan fungsional: mencakup analis, pengelola, pembina mutu, pengawas, dan analis pasar sejumlah 9 orang. Tenaga pendukung (bendahara, pengelola data, PPPK, Non PNS) berjumlah 39 orang (68,4%).

### 2.1.2.2. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perikanan

Kondisi prasarana dan perlengkapan merupakan asset miliki yang dikelola oleh Dinas Perikanan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi, sebagai berikut:

Tabel 2.3. Daftar Aset Dinas Perikanan

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH ASET YANG DIMILIKI | |
|---|---|---|---|
| | | UNIT | Rp. (000) |
| **A.** | **ASET TETAP PERALATAN & MESIN** | **709** | **8.504.526** |
| 1 | Crawler Excavator + Attachment | 1 | 1.155.990 |
| 2 | Air Compresor | 1 | 89.200 |
| 3 | Portable Generating Set | 1 | 6.500 |
| 4 | Stationary Generating Set | 1 | 24.800 |
| 5 | Electric Generating Set Lain-Lain | 1 | 20.400 |
| 6 | Sumersible Pump | 1 | 4.500 |
| 7 | Pompa Air | 11 | 58.920 |
| 8 | Pompa Lain-Lain | 8 | 26.721 |
| 9 | Station Wagon | 1 | 169.500 |
| 10 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 1 | 137.887 |
| 11 | Truck + Attachment | 1 | 467.300 |
| 12 | Pick Up | 7 | 1.087.378 |
| 13 | Sepeda Motor | 19 | 273.842 |
| 14 | alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) | 1 | 52.750 |
| 15 | Gerobak Dorong | 10 | 16.152 |
| 16 | Speed Boat / Motor Tempel | 4 | 173.200 |
| 17 | Perahu Penumpang | 1 | 19.900 |
| 18 | Hand Fallet | 1 | 4.950 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | Rol Meter | 1 | 150 |
| 20 | Jangka Berkaki | 1 | 500 |
| 21 | Global Positioning System | 3 | 19.850 |
| 22 | ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) | 2 | 9.573 |
| 23 | Timbangan Meja Capasitas 10 Kg | 4 | 10.000 |
| 24 | Alat Timbangan/Blora Lain-Lain | 7 | 28.278 |
| 25 | Lain-lain Alat Ukur Lainnya | 5 | 16.170 |
| 26 | Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya | 2 | 45.500 |
| 27 | Penyemprot Mesin (Power Sprayer) | 1 | 1.220 |
| 28 | Lain-lain Alat Penyimpanan | 4 | 31.400 |
| 29 | Rak-Rak Penyimpan | 3 | 39.375 |
| 30 | Lain-Lain Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian | 16 | 33.619 |
| 31 | Alat Laboratorium Lain-Lain | 1 | 2.000 |
| 32 | Alat Pembekuan | 12 | 130.034 |
| 33 | Boat Raft Lift Net ( Bagan Perahu/Rakit ) | 2 | 27.850 |
| 34 | Bak Pengendapan | 2 | 16.000 |
| 35 | Lain-lain Alat Produksi Perikanan | 42 | 275.719 |
| 36 | Alat Deteksi Kebuntingan Hewan | 1 | 49.750 |
| 37 | Mesin Penghitung Uang | 1 | 3.500 |
| 38 | Lemari Kayu | 9 | 21.795 |
| 39 | Rak Besi | 5 | 17.800 |
| 40 | Filing Cabinet Besi | 4 | 12.487 |
| 41 | Buffet | 1 | 717 |
| 42 | Lemari Sorok | 2 | 6.960 |
| 43 | Lemari Kaca | 20 | 39.240 |
| 44 | CCTV - Camera Control Television System | 1 | 12.100 |
| 45 | White Board | 6 | 4.400 |
| 46 | Alat Penghancur Kertas | 1 | 3.450 |
| 47 | Mesin Absensi | 4 | 64.430 |
| 48 | LCD Projector/Infocus | 1 | 16.700 |
| 49 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 2 | 9.355 |
| 50 | Papan Pengumuman | 1 | 10.000 |
| 51 | Papan Tulis | 3 | 233.100 |
| 52 | Brand Kas | 14 | 60.150 |
| 53 | Meja Kerja Besi/Metal | 7 | 45.177 |
| 54 | Meja Kerja Kayu | 17 | 30.917 |
| 55 | Kursi Kayu | 1 | 4.785 |
| 56 | Meja Rapat | 10 | 26.316 |
| 57 | Meja 1/2 Biro | 2 | 3.850 |
| 58 | Kursi Rapat | 92 | 36.710 |
| 59 | Kursi Tamu | 1 | 8.925 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60 | Kursi Biasa | 1 | 450 |
| 61 | Filling Besi/Metal | 1 | 1.500 |
| 62 | Lemari Es | 3 | 11.170 |
| 63 | A.C. Window | 6 | 28.749 |
| 64 | A.C. Split | 11 | 66.002 |
| 65 | Kipas Angin | 4 | 9.500 |
| 66 | A.C. Unit | 15 | 59.532 |
| 67 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 | 5.250 |
| 68 | lain-lain Alat Dapur | 38 | 84.467 |
| 69 | Radio | 2 | 3.400 |
| 70 | Televisi | 1 | 7.400 |
| 71 | Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) | 1 | 4.000 |
| 72 | Timbangan Barang | 5 | 22.500 |
| 73 | Handy Cam | 1 | 8.900 |
| 74 | Gordyin/Kray | 41 | 9.700 |
| 75 | Handtruck Troly Plastics | 8 | 5.650 |
| 76 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 8.250 |
| 77 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 1 | 2.400 |
| 78 | Meja Tamu Biasa | 1 | 6.720 |
| 79 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 | 3.960 |
| 80 | Kursi Kerja | 18 | 17.039 |
| 81 | Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 1 | 4.950 |
| 82 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 11 | 40.170 |
| 83 | Buffet Kaca | 3 | 8.700 |
| 84 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 1 | 4.600 |
| 85 | Audio Amplifier | 1 | 1.650 |
| 86 | Microphone/Wireless MIC | 2 | 14.250 |
| 87 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 1 | 1.700 |
| 88 | Audio Tape Reel Recorder | 1 | 9.400 |
| 89 | Camera Film | 1 | 7.850 |
| 90 | Lensa Kamera | 1 | 2.450 |
| 91 | Layar Film/Projector | 4 | 49.794 |
| 92 | Peralatan Pemetaan Pengukur Lain-Lain | 1 | 34.500 |
| 93 | Facsimile | 1 | 2.000 |
| 94 | Alat Komunikasi Radio VHF Lain-Lain | 2 | 5.900 |
| 95 | alat komunikasi khusus lainnya | 2 | 42.790 |
| 96 | Solar Cell | 1 | 362.567 |
| 97 | Tabung 02 | 5 | 8.325 |
| 98 | Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum) | 1 | 1.350 |
| 99 | Lain-lain alat kedokteran umum | 3 | 9.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | lain Alat kedokteran Bedah | 1 | 14.500 |
| 101 | Bak Fiberglass | 1 | 3.500 |
| 102 | PH Meter (Alat Laboratorium Umum) | 2 | 25.110 |
| 103 | Refractometer (Alat Laboratorium Umum) | 6 | 42.370 |
| 104 | Deep Freezer (Alat Laboratorium Kimia) | 2 | 1.553.456 |
| 105 | Mikroskop Binokuler | 1 | 36.630 |
| 106 | P.H Meter | 5 | 12.425 |
| 107 | Alat Selam | 28 | 65.500 |
| 108 | Lain-Lain Alat Laboratorium lain (Alat Tes HbA1C) | 5 | 12.250 |
| 109 | DO Meter (Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah) | 4 | 32.872 |
| 110 | Plankton Net (Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah) | 1 | 2.874 |
| 111 | P.C Unit | 10 | 101.297 |
| 112 | Lap Top | 20 | 255.482 |
| 113 | Monitor | 1 | 1.624 |
| 114 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 13 | 47.404 |
| 115 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 2 | 9.000 |
| 116 | External/ Portable Hardisk | 5 | 5.950 |
| 117 | Hard disk Eksternal | 4 | 4.333 |
| 118 | produksi lainnya lainnya | 1 | 4.900 |
| 119 | Genset | 2 | 260.935 |
| 120 | Pallet | 5 | 8.500 |
| 121 | Peralatan Olahraga Air lainnya | 1 | 58.245 |
| **B.** | **ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN** | **74** | **14.027.074** |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 31 | 6.651.394 |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen | 1 | 21.500 |
| 3 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 4 | 1.913.051 |
| 4 | Bangunan Kamar Mandi | 4 | 2.514.541 |
| 5 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 1 | 149.428 |
| 6 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 | 129.741 |
| 7 | Gedung Pos Jaga Permanen | 1 | 49.750 |
| 8 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 1 | 473.479 |
| 9 | Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain | 1 | 720 |
| 10 | Bangunan Gedung Pabrik Permanen | 1 | 174.906 |
| 11 | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | 1 | 412.167 |
| 12 | Tugu Pembangunan | 18 | 679.498 |
| 13 | Tugu Peringatan Lainnya | 2 | 379.805 |
| 14 | Monomen/Bangunan Bersejarah Lain-lain | 2 | 19.910 |
| 15 | Lain-lain Tugu/Tanda Batas | 2 | 1.452 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Pagar Permanen | 3 | 455.730 |
| **C.** | **ASET TETAP TANAH** | **7** | **330.204** |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2 | 76.104 |
| 2 | Tanah Bangunan Rumah Pengeringan | 1 | 53.500 |
| 3 | Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan | 4 | 200.600 |
| **D.** | **ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN** | **49** | **11.960.623** |
| 1 | Jalan Desa | 1 | 171.250 |
| 2 | Jalan Khusus Lainnya | 2 | 69.875 |
| 3 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | 19.445 |
| 4 | Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | 681.578 |
| 5 | Saluran Pasang Tertutup/Terowongan | 1 | 694.886 |
| 6 | Bangunan Sadap | 1 | 693.803 |
| 7 | Kolam Pasang | 13 | 3.919.697 |
| 8 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 9 | 4.099.563 |
| 9 | Bangunan Air Besih/Air Baku Lain-lain | 1 | 2.693 |
| 10 | Sumur Resapan | 3 | 68.776 |
| 11 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang | 5 | 976.259 |
| 12 | Penampungan Air Hujan (PAH) | 7 | 448.074 |
| 13 | Lain-lain Jaringan Transmisi | 2 | 89.873 |
| 14 | Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA | 1 | 4.850 |
| 15 | Lain-lain Jaringan Distribusi | 1 | 20.000 |
| **E.** | **ASET TETAP LAINNYA** | **19** | **25.457** |
| 1 | Ilmu Pengetahuan Umum | 16 | 2.800 |
| 2 | Maket/Miniatur/Replika | 3 | 22.657 |

*Sumber: Daftar BMD pada Pengguna Barang e-BMD (2024)*

Berdasarkan tabel diatas Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo memiliki berbagai sarana dan prasarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik berupa peralatan, kendaraan operasional, gedung kantor, laboratorium, jaringan infrastruktur, maupun aset lainnya.

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

#### 2.1.3.1. Pencapaian kinerja Pelayanan Urusan Perikanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan yang diatur dalam Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Perikanan telah mencapai kinerja sebagaimana tabel berikut ini

Dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, target dan tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo kurun waktu tahun 2020-2024 (tabel 2.11) dalam produksi perikanan terlihat fluktuatif

Sedang Tabel target dan tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan dapat dilihat pada lampiran tabel 2.11 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Total Produksi Perikanan | - | - | - | 39.095 ton | 42.584 ,94 ton | | | | 39.164 ,35 ton | 41.234 ,31 ton | | | | 100,18% | 96,83% | | | |
| 2 | Presentase Produksi Perikanan | - | - | - | | | 7% | 7% | 2% | | | 5,8% | 6,07% | 0,74% | | | 82,86% | 86,71% | 37% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Target produksi perikanan yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan dari 39.095 ton pada tahun pertama menjadi 42.584,94 ton pada tahun terakhir. Realisasi produksi pada periode yang sama relatif stabil dan mendekati target, yaitu sebesar 39.164,35 ton hingga 41.234,31 ton. Rasio capaian kinerja menunjukkan bahwa produksi perikanan mampu melampaui target pada tahun pertama (100,18%), meskipun pada tahun berikutnya mengalami sedikit penurunan capaian menjadi 96,83%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum produksi perikanan di Kabupaten Probolinggo berada dalam tren positif, meski belum sepenuhnya memenuhi target akhir yang direncanakan.

Target persentase produksi perikanan ditetapkan sebesar 7% hingga 2% dalam kurun waktu lima tahun. Realisasi capaian menunjukkan fluktuasi, dengan pencapaian 5,8% pada tahun awal dan menurun drastis hingga hanya 0,74% pada tahun akhir periode. Rasio capaian pun tercatat menurun signifikan dari 82,86% menjadi hanya 37%. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam peningkatan kontribusi persentase produksi perikanan, yang dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti iklim, perubahan harga pasar, hingga keterbatasan sarana produksi yang dimiliki oleh nelayan maupun pembudidaya ikan.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo pada periode 2020–2024 memperlihatkan bahwa indikator jumlah produksi perikanan relatif terjaga dan mampu mendekati target, sedangkan indikator persentase produksi perikanan masih menghadapi hambatan yang signifikan. Ke depan, dibutuhkan strategi lebih intensif dalam peningkatan produktivitas, diversifikasi komoditas, serta penguatan dukungan sarana dan prasarana untuk memastikan capaian kinerja dapat lebih optimal dan berkelanjutan

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan Perikanan Kabupaten Probolinggo

| Uraian Nama Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp juta) | | | | Realisasi (Rp juta) | | | | Rasio realisasi dan anggaran (%) | | | | Rerata pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | nggaran | Realisasi |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 4.941 | 5.028 | 5.784 | 5.456 | 4.940 | 4.650 | 4.710 | 5.270 | 99,98 | 92,48 | 81,43 | 96,59 | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 196 | 36 | 20 | 29 | 94 | 33 | 18 | 23 | 47,96 | 91,67 | 90,00 | 79,31 | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.428 | 3.797 | 4.619 | 4.332 | 3548 | 3.478 | 3.616 | 4.206 | 99,16 | 91,60 | 78,29 | 97,09 | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 327 | 219 | 176 | 243 | 282 | 202 | 159 | 230 | 86,24 | 92,24 | 90,34 | 94,65 | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 128 | 14 | - | - | 127 | 14 | - | - | 99,22 | 100,00 | #VALUE! | #VALUE! | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 797 | 837 | 869 | 776 | 731 | 807 | 824 | 717 | 91,72 | 96,42 | 94,82 | 92,40 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 158 | 123 | 98 | 75 | 158 | 116 | 91 | 71 | 100,00 | 94,31 | 92,86 | 94,67 | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 1.141 | 690 | 896 | 1.217 | 1.041 | 671 | 818 | 1.149 | 91,24 | 97,25 | 91,29 | 94,41 | | |
| Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 745 | 69 | 200 | 133 | 651 | 64 | 176 | 127 | 87,38 | 92,75 | 88,00 | 95,49 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 242 | 454 | 654 | 1.044 | 220 | 421 | 613 | 988 | 90,91 | 92,73 | 93,73 | 94,64 | | |
| Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 110 | 123 | 42 | 39 | 101 | 93 | 28 | 33 | 91,82 | 75,61 | 66,67 | 84,62 | | |
| Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 43 | 42 | - | - | 42 | 39 | - | - | 97,67 | 92,86 | #VALUE! | #VALUE! | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 2.164 | 2.819 | 971 | 1.879 | 2.022 | 2.429 | 804 | 1.547 | 93,44 | 86,17 | 82,80 | 82,33 | | |
| Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 273 | 274 | 363 | 327 | 255 | 255 | 307 | 277 | 93,41 | 93,07 | 84,57 | 84,71 | | |
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 1.890 | 2.545 | 608 | 1.552 | 1.767 | 2174 | 496 | 1.269 | 93,49 | 85,42 | 81,58 | 81,77 | | |
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 47 | 49 | 10 | 33 | | 43 | 10 | 29 | 0,00 | 87,76 | 100,00 | 87,88 | | |
| Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | 47 | 49 | 10 | 33 | 47 | 43 | 10 | 29 | 100,00 | 87,76 | 100,00 | 87,88 | | |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 2.290 | 498 | 333 | 3.471 | 2.141 | 572 | 316 | 1.339 | 93,49 | 98,62 | 94,89 | 38,58 | | |
| Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 27 | 23 | 6 | 30 | 23 | 20 | 6 | 28 | 85,19 | 86,96 | 100,00 | 93,33 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 1.867 | 130 | 226 | 76 | 1.681 | 223 | 214 | 64 | 90,04 | 99,11 | 94,69 | 84,21 | | |
| Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 448 | 344 | 100 | 3.365 | 437 | 329 | 95 | 1.246 | 97,54 | 95,64 | 95,00 | 37,03 | | |

Secara umum, realisasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Perikanan menunjukkan fluktuasi capaian dari tahun 2021–2024. Meskipun sebagian besar program mampu direalisasikan dengan tingkat efektivitas yang relatif baik (di atas 85%), terdapat pula beberapa kegiatan yang konsistensinya masih rendah dan membutuhkan penguatan perencanaan serta eksekusi. Program penunjang relatif konsisten dan menunjukkan capaian yang baik. Program perikanan tangkap dan budidaya masih menghadapi masalah efektivitas dan konsistensi, meski terdapat keberhasilan pada aspek pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan kecil. Program pengawasan memerlukan stabilitas dalam pelaksanaan agar tidak hanya bergantung pada tahun tertentu. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih menjadi titik lemah dengan rasio serapan rendah, padahal sektor ini berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah perikanan daerah.

### 2.1.3.2. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Perikanan dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Perikanan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. SWOT Pelayanan Dinas Perikanan

| MATRIK SWOT | |
|---|---|
| KEKUATAN | KELEMAHAN |
| 1) Tersedianya dana APBD dibidang Kelautan dan Perikanan;<br>2) Adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang Kelautan dan Perikana<br>3) Adanya Program Ekonomi Biru Kementerian Kelautan Perikanan yang berkomitmen mewujudkan misi 8 asta cita yang diusung Presiden;<br>4) Kebijakan pemerintah pusat untuk mengembangkan wilayah strategis nasional termasuk Minapolitan;<br>5) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung; | 1) Kurangnya personil teknis yang menguasai bidang Pengawasan Perikanan;<br>2) Belum tersedianya Laboratorium untuk Penyakit Ikan;<br>3) Kurangnya personil teknis Penyuluh Perikanan yang menguasai bidang Pembudidaya dan Pembenihan Ikan<br>4) Kurangnya personil teknis Penyuluh Perikanan yang menguasai bidang Perikanan Tangkap<br>5) Kurangnya personil teknis Penyuluh Perikanan yang menguasai bidang Pengiolahan dan Pemasar Hasil Perikanan.<br>6) Kurangnya personil/ SDM yang menguasai bidang Pengawasan Perikanan.<br>7) Kurangnya Sarana dan Prasarana pada UPT TPI dan UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/ Payau dalam menunjang keberlangsungan |

| | |
|---|---|
| | pelayanan kepada masyarakat<br>8) Pengaduan masyarakat bersifat pasif atau menunggu laporan dari masyarakat dan masih ada beberapa pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan penanganan instansi lain atau Provinsi Jawa Timur; |
| PELUANG | TANTANGAN |
| 1) Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang perikanan dan kelautan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi<br>2) Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja Perikanan Kelautan dan masyarakat seperti program EKONOMI BIRU, Program SWASEMBADA PERIKANAN Perikanan Kelautan<br>3) Adanya sektor Dukungan penyelenggaraan pelatihan dibidang Perikanan dan kelautan | 1) Semakin bertambahnya jumlah dan jenis usaha dan/atau kegiatan<br>2) Masih kurangnya kesadaran Pelaku Usaha Perikanan terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku.<br>3) Terbatasnya modal dalam mengembangkan usaha penangkapan ikan, budidaya ikan, dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.<br>4) Terdapat beberapa Nelayan yang masih menggunakan alat |

| | |
|---|---|
| 4) Adanya program CSR perusahaan yang mendukung pengelolaan lingkungan<br>1) | tangkap tidak ramah lingkungan.<br>5) Kurang pemahaman terhadap pencegahan dan pengobatan penyakit ikan pada lingkungan budidaya.<br>6) Kurang pemahaman terhadap Cara Budidaya Ikan yang Baik oleh Pembudidaya Perikanan<br>7) Continuitas ketersediaan bahan baku ikan rendah.<br>8) Saran dan Prasaranan yang dimiliki Pelaku Usaha Perikanan belum semuanya dapat memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan hasil produksinya.<br>1) |

Dengan Dari faktor-faktor diatas, Dinas Peirkanan mengangkat beberapa isu strategis, antara lain sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
b. Aktifitas penangkapan ikan terbatas oleh musim;
c. Tingginya resiko pekerjaan nelayan;
d. Terbatasnya modal dalam mengembangkan usaha penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
e. Masih rendahnya produktivitas usaha budidaya perikanan;
f. Belum optimalnya efisiensi usaha perikanan budidaya;
g. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi;

h. Masih rendahnya kesadaran Pelaku Usaha Perikanan terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku;
i. Masih rendahnya ketersediaan bahan baku ikan dalam rantai pasok
j. Terbatasnya Saran dan Prasarana yang dimiliki Pelaku Usaha Perikanan;
k. Belum optimalnya serapan pasar terhadap hasil perikanan dan olahan perikanan;
l. Masih rendahnya pengawasan keamanan Perikanan hasil perikanan.

### 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan sebagian besar adalah masyarakat, namun jika dipertajam tiap bidang, bisa dituliskan sebagai berikut :

A. Bidang Perikanan Tangkap

Terkait dengan peningkatan sarana prasarana penangkapan, perlindungan nelayan, fasilitasi perizinan kapal, dan penguatan kelembagaan nelayan, sasarannya adalah Nelayan kecil dan nelayan tradisional di wilayah laut maupun perairan umum (sungai, waduk, rawa, dan danau); Kelembagaan nelayan (kelompok nelayan, koperasi nelayan, dan lembaga ekonomi perikanan); Unit usaha Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolanya; Kapal perikanan skala kecil (≤10 GT) beserta pemilik/penggunanya.

B. Bidang Perikanan Budidaya

Terkait dengan peningkatan kapasitas teknis, penyediaan sarana produksi, pencegahan penyakit ikan, sertifikasi benih/produk, serta fasilitasi pemasaran, sasarannya adalah Pembudi daya ikan kecil dan rumah tangga (Pokdakan); Pembenih ikan skala kecil; Kelembagaan pembudi daya (kelompok, koperasi budidaya, asosiasi pembudi daya); Masyarakat pesisir dan perdesaan yang memanfaatkan lahan air tawar, payau, maupun laut untuk budidaya.

C. Bidang Bina Usaha Perikanan

Terkait dengan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, fasilitasi sertifikasi, penyediaan bahan baku, akses pasar, serta pengembangan jejaring distribusi produk., sasarannya adalah Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pengolahan hasil perikanan; Kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) hasil perikanan; Industri pengolahan ikan skala rumah tangga dan kecil; Konsumen dan masyarakat umum sebagai penerima manfaat produk perikanan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

D. Pengawasan Perikanan

Terkait dengan Pengawasan kepatuhan terhadap perizinan usaha perikanan (kapal, alat tangkap, budidaya, pengolahan, dan pemasaran); Pembinaan dan penguatan kapasitas pengawas perikanan di tingkat lapangan; Fasilitasi kelembagaan pengawas masyarakat (Pokmaswas) untuk pengawasan partisipatif; Sosialisasi aturan dan ketentuan hukum perikanan untuk mencegah pelanggaran; Perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan laut maupun darat agar berkelanjutan. Sasarannya adalah Nelayan kecil dan pembudi daya ikan → sebagai pelaku utama yang perlu diberikan pembinaan agar mematuhi aturan perikanan; Pelaku usaha perikanan (penangkap, pembudi daya, pengolah, pemasar) → yang wajib memenuhi ketentuan perizinan, standar mutu, dan aturan pengelolaan sumber daya; Kelembagaan nelayan/pembudi daya/pengolah (kelompok nelayan, Pokdakan, Poklahsar, koperasi perikanan) → sebagai mitra dalam pengawasan partisipatif; Masyarakat pesisir dan perdesaan perikanan → sebagai pengawas berbasis masyarakat (community based surveillance) yang turut menjaga sumber daya.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo yang memiliki tugas pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan diharapkan menjadi yang terdepan dalam mengawal pembangunan berkelanjutan ekonomi biru. Untuk mencapai harapan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo berupaya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi 5 (lima) tahun mendatang. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan lsu Strategis PD

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| - Potensi kawasan perikanan antara lain kawasan perikanan darat (perikanan kolam dan keramba diKecamatan Paiton, Krakasan, Pajarakan, Gending, Dringu, Tongas dan Sumberasih). | - Keterbatasan sarana prasarana penangkapan; nelayan kecil rentan kemiskinan; TPI belum optimal.<br><br>- Produktivitas rendah; keterbatasan benih dan pakan; serangan penyakit ikan. | - Penurunan kontribusi PDRB pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan disetiap tahunnya<br><br>- Penurunan pertanian, kehutanan dan perikanan adalah karena | - Perubahan iklim memengaruhi stok ikan global;<br><br>- Tren permintaan produk akuakultur ramah lingkungan; sertifikasi global (eco-label). | - Program nasional perlindungan nelayan kecil; industrialisasi perikanan tangkap.<br><br>- Program kemandirian pakan, revitalisasi tambak udang, kampung perikanan budidaya. | - Akses pasar regional terbatas; konflik pemanfaatan ruang pesisir.<br><br>- Kompetisi antarwilayah produsen budidaya; degradasi lahan tambak. | - Peningkatan kesejahteraan nelayan kecil melalui modernisasi armada, kelembagaan nelayan, perlindungan sosial, dan penguatan TPI.<br><br>- Peningkatan produksi budidaya berkelanjutan melalui inovasi teknologi, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensi kawasan perikanan laut di Kecamatan Paiton, Krakasan, Pajarakan, Gending, Dringu, Tongas, Sumberasih.<br><br>- Potensi perikanan laut dan darat (kolam dan keramba) di Kawasan pesisir, | Rendahnya mutu produk; keterbatasan akses pasar; lemahnya daya saing UMKM.<br><br>Lemahnya kelembagaan ekonomi; partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah. | berkurangnya luas lahan | - Standar mutu global (HACCP, eco-label); kebutuhan pangan sehat dan bergizi.<br><br>- Isu keadilan sosial-ekonomi; peran komunitas dalam menjaga ekosistem global. | - Gerakan nasional makan ikan (Gemarikan); hilirisasi hasil perikanan.<br><br>- Program pemberdayaan masyarakat pesisir; pengawasan sumber daya berbasis masyarakat. | - Persaingan produk antar daerah; keterbatasan infrastruktur distribusi<br><br>- Ketimpangan kapasitas antarwilayah pesisir. | penyediaan benih unggul, pakan mandiri, dan sarana dan prasarana budidaya dan pembenihan ikan<br><br>- Peningkatan mutu, keamanan, dan daya saing produk perikanan melalui fasilitasi sertifikasi, teknologi pengolahan, dan akses pasar.<br><br>- Penguatan kelembagaan ekonomi perikanan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan. |
| | | | | | | |

Kabupaten Probolinggo memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, baik pada sektor perikanan darat maupun laut. Potensi tersebut tersebar di berbagai kecamatan pesisir seperti Paiton, Kraksaan, Pajarakan, Gending, Dringu, Tongas, dan Sumberasih. Pada kawasan ini, aktivitas perikanan darat meliputi budidaya ikan kolam dan keramba, sedangkan perikanan laut meliputi kegiatan penangkapan ikan,

pengolahan hasil tangkapan, dan distribusi ke berbagai wilayah. Dengan karakteristik wilayah yang memiliki garis pantai cukup panjang serta potensi lahan budidaya air tawar yang luas, sektor perikanan menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.

Meskipun memiliki potensi besar, sektor perikanan di Kabupaten Probolinggo masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan ikan membuat hasil tangkapan nelayan kecil belum optimal. Sebagian besar nelayan masih berada dalam kondisi rentan kemiskinan, dengan produktivitas dan pendapatan yang rendah. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di beberapa lokasi belum berfungsi maksimal sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan. Selain itu, sektor budidaya juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan benih unggul, tingginya harga pakan, serta ancaman serangan penyakit ikan. Dari sisi pasca panen, rendahnya mutu produk, keterbatasan akses pasar, dan lemahnya daya saing UMKM perikanan menjadi hambatan utama dalam meningkatkan nilai tambah. Sementara itu, kelembagaan ekonomi nelayan masih lemah dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan belum berjalan optimal.

Dari perspektif lingkungan hidup dan keberlanjutan (KLHS), terdapat kecenderungan penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Probolinggo. Hal ini sebagian disebabkan oleh berkurangnya luas lahan produktif akibat alih fungsi lahan dan degradasi ekosistem pesisir. Selain itu, perubahan iklim menjadi tantangan serius karena memengaruhi ketersediaan stok ikan, pola migrasi ikan, serta stabilitas ekosistem laut dan pesisir. Isu-isu tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Dalam konteks lingkungan dinamis global, muncul tren dan tuntutan baru terhadap produk perikanan yang ramah lingkungan, memiliki sertifikasi internasional seperti eco-label dan HACCP, serta memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Permintaan pasar global terhadap produk akuakultur yang berkelanjutan dan bergizi tinggi juga meningkat. Di sisi lain, isu keadilan sosial-ekonomi dan peran komunitas dalam menjaga ekosistem global menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan sektor kelautan dan perikanan.

Secara nasional, arah kebijakan pemerintah menekankan pada perlindungan nelayan kecil, industrialisasi perikanan tangkap, program kemandirian pakan, revitalisasi tambak udang, dan pengembangan kampung perikanan budidaya. Gerakan Nasional Makan Ikan (Gemarikan) serta hilirisasi produk perikanan menjadi prioritas untuk meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat rantai nilai industri perikanan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengawasan sumber daya perikanan berbasis masyarakat menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan sektor ini.

Di tingkat regional, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan akses pasar antarwilayah, konflik pemanfaatan ruang pesisir, kompetisi antarprodusen budidaya, degradasi lahan tambak, serta ketimpangan kapasitas antarwilayah pesisir. Kondisi ini menuntut adanya sinergi kebijakan antar daerah dan penguatan infrastruktur distribusi hasil perikanan agar produk lokal Probolinggo dapat bersaing di pasar regional.

Berdasarkan kondisi potensi, permasalahan, dan dinamika lingkungan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo menetapkan beberapa isu strategis utama yang menjadi fokus arah kebijakan ke depan. Pertama, peningkatan kesejahteraan nelayan kecil melalui modernisasi armada, penguatan kelembagaan, perlindungan sosial, dan optimalisasi fungsi TPI. Kedua, peningkatan produksi budidaya ikan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi teknologi, penyediaan benih unggul, pakan mandiri, serta penguatan sarana dan prasarana produksi. Ketiga, peningkatan mutu, keamanan,

dan daya saing produk perikanan melalui fasilitasi sertifikasi, penerapan teknologi pengolahan modern, dan perluasan akses pasar domestik maupun ekspor. Keempat, penguatan kelembagaan ekonomi perikanan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Isu-isu strategis tersebut menjadi landasan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas selama periode perencanaan 2025–2029, dengan tujuan mewujudkan masyarakat pesisir yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam kerangka pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

### 2.2.1 Isu-isu strategis

Isu strategis yang telah diidentifikasi pada sektor perikanan memiliki implikasi langsung terhadap arah pembangunan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Permasalahan yang terkait dengan keterbatasan sarana prasarana, rendahnya produktivitas, lemahnya kelembagaan ekonomi, serta menurunnya daya saing produk menuntut adanya transformasi kebijakan yang lebih terintegrasi, inovatif, dan berbasis pada potensi unggulan daerah.

Implikasi pertama dari isu strategis tersebut adalah perlunya **penguatan ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan** sebagai salah satu tujuan utama Renstra Dinas Perikanan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil melalui modernisasi armada penangkapan, penyediaan sarana produksi, dan penerapan teknologi tepat guna dalam kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya. Program peningkatan kapasitas nelayan, pelatihan kewirausahaan, serta akses terhadap perlindungan sosial menjadi bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Implikasi kedua adalah pentingnya **peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan**. Isu rendahnya produktivitas akibat keterbatasan benih unggul, pakan, dan teknologi budidaya harus dijawab melalui inovasi sistem produksi seperti pengembangan kolam bundar (*Kolbun Salim*), penerapan teknologi ramah lingkungan, serta kemandirian pakan lokal. Sasaran strategis dari arah kebijakan ini adalah meningkatnya volume dan efisiensi produksi perikanan budidaya dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi pesisir dan perairan darat.

Implikasi ketiga berkaitan dengan **peningkatan mutu dan daya saing produk perikanan daerah**. Adanya tuntutan global terhadap standar mutu dan keamanan pangan (HACCP, eco-label) serta peningkatan permintaan produk perikanan ramah lingkungan menuntut Dinas Perikanan untuk memperkuat fasilitasi sertifikasi produk, peningkatan kapasitas pengolahan, serta akses pasar domestik dan ekspor. Dengan demikian, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya nilai tambah produk perikanan, berkembangnya industri pengolahan ikan skala kecil-menengah, serta peningkatan posisi tawar produk perikanan Kabupaten Probolinggo di tingkat regional dan nasional.

Implikasi berikutnya adalah perlunya **penguatan kelembagaan ekonomi perikanan dan tata kelola sumber daya yang partisipatif**. Lemahnya kelembagaan ekonomi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya menuntut upaya revitalisasi kelembagaan seperti kelompok nelayan, koperasi, BUMDes perikanan, serta forum pengelolaan sumber daya bersama. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, terbentuknya kelembagaan ekonomi yang mandiri, serta meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya pesisir secara kolaboratif.

Selain itu, isu-isu terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan memberikan implikasi terhadap perlunya **adaptasi kebijakan sektor perikanan yang berwawasan lingkungan dan tahan terhadap perubahan iklim**. Dinas Perikanan perlu memperkuat kapasitas adaptasi

nelayan terhadap risiko iklim ekstrem, peningkatan kesadaran lingkungan, serta integrasi prinsip ekonomi biru (*blue economy*) dalam setiap program. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dan global yang menekankan pembangunan ekonomi kelautan yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, implikasi dari berbagai isu strategis tersebut menjadi dasar bagi penetapan **tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo 2025–2029**, yaitu:

1. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan melalui penguatan kapasitas, perlindungan, dan modernisasi usaha perikanan.**
2. **Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan melalui inovasi teknologi dan penguatan sarana prasarana produksi.**
3. **Meningkatkan mutu, keamanan, dan daya saing produk perikanan daerah untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah.**
4. **Memperkuat kelembagaan ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.**
5. **Meningkatkan ketahanan sektor perikanan terhadap perubahan iklim dan mendorong penerapan prinsip ekonomi biru.**

Dengan arah dan sasaran tersebut, diharapkan pembangunan sektor perikanan Kabupaten Probolinggo ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara inklusif dan berkeadilan.

# BAB III.

# TUJUAN, SASARAN,

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo beserta indikator kinerjanya. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan menyesuaikan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029. Sedangkan strategi dan arah kebijakan lebih menjelaskan upaya yang bersifat teknis secara bertahap yang perlu diprioritaskan dalam mendukung sasaran untuk setiap tahunnya.

## 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan

Sasaran Strategis Dinas Perikanan tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yaitu ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah Religius serta Eksis Berdaya Saing").*** Disini, Dinas Perikanan berada pada pokok visi Eksis Berdaya Saing.

Keadaan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan lingkungan sosial yang sehat dengan budaya yang maju. Menggunakan cara-cara baru dan inovatif untuk perbaikan Pembangunan. Memperhatikan kualitas dan keberlanjutan perekonomian dalam lingkup perikanan menjadi salah satu bagian penting dalam setiap langkah pembangunan. Kabupaten Probolinggo memiliki daya saing yang kuat dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam keberhasilan capaian pembangunannya. SAE ekonomi dan infrastrukturnya**,** yaitu maju secara ekonomi, didukung infrastruktur yang berkualitas, merata, serta berpijak pada prinsip pembangunan. Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di

sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan.

Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan, memberikan arah yang jelas, sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan dengan Pokok-pokok visi.

Dinas Perikanan masuk dalam misi **"Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang Kreatif dan Inovatif di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Berbasis Desa dan Komunitas Untuk Menciptakan Lapangan Kerja dan Memberantas Kemiskinan (SAE Ekonomi))".** Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat memperkuat daya saing daerah terutama dalam meningkatkan nilai investasi, salah satunya melalui revitalisasi BUMD. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui peningkatan produktivitas para pelaku ekonomi maupun sektor-sektor unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, industri, dan perdagangan yang terstandarisasi secara global, berakar pada budaya lokal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan visi da misi tersebut, yang selaras dengan Dinas Perikanan adalah **Tujuan dan Sasaran Misi 2** Pemerintah Kabupaten, yaitu **: "**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan, dengan inikator tujuannya adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan. Sedang sasaran yang sesuai adalah "Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah" dengan indikator sasaran Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Dari penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup mengambil tujuan yang selaras dengan salah satu sasaran tersebut, yaitu : Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah" dengan indikator sasaran Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Dalam menentukan arahnya Urusan Perikanan Kabupaten Probolinggo mengacu kepada salah satu Tujuan RPJMD yaitu **Terciptanya masyarakat yang berkualitas Unggul dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kesejahteraan.** Dan diturunkan dalam Sasaran RPJMD dengan rumusan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan Indikator Persentase Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi (PoU). Sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini :

Tabel 3.1 Cascading

| | | | |
|---|---|---|---|
| VISI :<br>***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah Religius serta Eksis Berdaya Saing")*** | | | |
| MISI IV:<br>**Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang Kreatif dan Inovatif di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Berbasis Desa dan Komunitas Untuk Menciptakan Lapangan Kerja dan Memberantas Kemiskinan (SAE Ekonomi)** | | | |
| Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan,<br><br>dengan inikator tujuannya adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan | Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah"<br><br>dengan indikator sasaran Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Pertanian Dalam Arti Luas<br><br>Dengan indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Meningkatnya Produksi Perikanan Indikator :<br>1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan<br>2. Nilai AKIP |

## 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perikanan, maka terdapat **strategi** yang diacu dalam Rencana Strategis yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga nelayan dan pembudi daya ikan.
2. Meningkatnya produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.
3. Meningkatnya daya saing produk perikanan melalui pengolahan, sertifikasi mutu, dan perluasan akses pasar.
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya perikanan, kepatuhan perizinan, serta pelestarian ekosistem pesisir dan perairan umum.
5. Menguatnya kapasitas kelembagaan nelayan, pembudi daya, dan pelaku usaha perikanan berbasis masyarakat.
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Tabel 3.2 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **Dinas Perikanan** | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah | Pertumbuhan PDRB Pertanian Dalam Arti Luas | Meningkatnya Produksi Perikanan | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan | 0,74% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |

Berdasarkan Tabel 3.2, tujuan pembangunan sektor perikanan Kabupaten Probolinggo dalam periode Renstra 2025–2029 adalah untuk **meningkatkan produksi perikanan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan PDRB pertanian dalam arti luas**. Tujuan ini selaras dengan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo, yaitu pengembangan sektor usaha berbasis potensi unggulan daerah, di mana subsektor perikanan memiliki peran strategis baik dari sisi produksi maupun kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sasaran yang ditetapkan adalah **meningkatnya produksi perikanan** yang diukur melalui indikator **persentase peningkatan produksi perikanan**. Pada tahun 2024, capaian baseline peningkatan produksi perikanan baru mencapai **0,74%**, sehingga diperlukan langkah-langkah akselerasi dalam lima tahun ke depan. Target yang ditetapkan secara konsisten adalah **2% per tahun mulai tahun 2025 hingga tahun 2030**. Penetapan target ini menunjukkan adanya dorongan untuk menjaga pertumbuhan produksi secara stabil, realistis, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan nelayan, serta daya saing subsektor perikanan daerah.

Dengan demikian, melalui tujuan, sasaran, indikator, serta target yang dirumuskan dalam tabel tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo berkomitmen untuk mewujudkan sektor perikanan yang tidak hanya menjadi penopang perekonomian daerah, tetapi juga memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat perikanan.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

| **TAHAP I** | **TAHAP II** | **TAHAP III** | **TAHAP IV** | **TAHAP V** |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fondasi digitalisasi dan data perikanan | Infrastruktur produksi & distribusi perikanan. | Fokus pemberdayaan SDM dan kelompok nelayan serta pembudidaya | Dorong nilai tambah & ekonomi local pelaku usaha perikanan | Pastikan keberlanjutan & konservasi jangka panjang urusan perikanan |

Arah kebijakan pembangunan juga disusun berdasarkan Sasaran Pokok dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029. Oleh karena itu, tahapan tahapan yang digariskan dalam RPJMD ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mendukung dan menjamin Petani Sejahtera, melalui Peningkatan produktivitas hasil pertanian/ perikanan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas, menjaga stabilitas harga hasil produksi pertanian/ perikanan, serta hilirisasi produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas | Pengembangan sektor industri bagi komoditas unggulan daerah dalam rangka hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah<br><br>Perluasan akses pasar komoditas unggulan daerah<br><br>Peningkatan produktivitas pertanian/ perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi dan implementasi teknologi | Mendorong peningkatan produktivitas nelayan kecil melalui modernisasi peralatan tangkap ramah lingkungan.<br><br>Fasilitasi perlindungan nelayan dalam bentuk asuransi dan jaminan sosial.<br><br>Kelembagaan Kelompok Nelayan<br><br>Meningkatkan ketersediaan benih unggul dan pakan berkualitas.<br><br>Mendorong pola budidaya ramah lingkungan dengan efisiensi lahan dan air.<br><br>Meningkatkan kapasitas kelembagaan pembudi daya dan penyuluh perikanan.<br><br>Peningkatan akses UMKM perikanan terhadap teknologi pengolahan dan pembiayaan.<br><br>Mendorong sertifikasi mutu, keamanan pangan, dan halal produk perikanan.<br><br>Pengembangan promosi dan pemasaran berbasis digital serta perluasan pasar regional-nasional. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan intensitas pengawasan perizinan kapal, alat tangkap, dan usaha budidaya.<br><br>Pengembangan kelembagaan Pokmaswas sebagai mitra pengawasan. | |

Arah kebijakan pembangunan sektor perikanan Kabupaten Probolinggo dalam Renstra 2025–2029 disusun dengan mengacu pada operasionalisasi NSPK dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD. Fokus utama kebijakan adalah mendukung dan menjamin kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktivitas, penyediaan sarana dan prasarana berkualitas, stabilitas harga, serta hilirisasi produk agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

Dalam kerangka RPJMD, kebijakan diarahkan pada pengembangan sektor industri berbasis komoditas unggulan daerah melalui hilirisasi, peningkatan produktivitas perikanan yang berkelanjutan dengan penerapan modernisasi dan teknologi, serta perluasan akses pasar komoditas perikanan. Hal ini dioperasionalisasikan lebih lanjut dalam Renstra Dinas Perikanan dengan sejumlah kebijakan spesifik.

Pertama, pada bidang perikanan tangkap, kebijakan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas nelayan kecil melalui modernisasi alat tangkap ramah lingkungan, penyediaan perlindungan nelayan berupa asuransi dan jaminan sosial, serta penguatan kelembagaan kelompok nelayan. Kedua, pada bidang budidaya perikanan, difokuskan pada peningkatan ketersediaan benih unggul dan pakan berkualitas, penerapan pola budidaya ramah lingkungan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pembudi daya dan penyuluh perikanan.

Ketiga, pada bidang pengolahan dan pemasaran, arah kebijakan meliputi peningkatan akses UMKM perikanan terhadap teknologi pengolahan dan pembiayaan, dorongan sertifikasi mutu, keamanan pangan, dan halal, serta pengembangan promosi dan pemasaran berbasis digital yang terhubung dengan pasar regional maupun nasional. Keempat, pada bidang pengawasan perikanan, kebijakan difokuskan pada peningkatan intensitas pengawasan perizinan kapal, alat tangkap, dan usaha budidaya, serta penguatan kelembagaan Pokmaswas sebagai mitra pengawasan partisipatif di masyarakat.

Dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan sektor perikanan Kabupaten Probolinggo mampu berkembang lebih maju, berdaya saing, sekaligus memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudi daya, pengolah, dan seluruh pelaku usaha perikanan di daerah.

# BAB IV.
# PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 4.1. Program. Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program yang digunakan oleh Dinas Perikanan ada 5 (lima) program yang akan mendukung capaian kinerja. Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Probolinggo yang harus diselaraskan dengan Kepermendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH;
   a) Tujuan dari program tersebut adalah memenuhi kebutuhan penunjang operasional kantor, dari mulai belanja pegawai baik untuk ASN maupun non-ASN, penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, hingga evaluasi kinerja, pengadaan sarana prasarana kantor, serta pemeliharaannya.
   b) Sasarannya adalah karyawan dan karyawati kantor Dinas Lingkungan Hidup;
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
   a) Sasaran: Nelayan, Masyarakat sekitar Perairan Umum Daratan, Pengelola UPT TPI Paiton
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
   a) Sasaran : Pelaku Usaha dibidang budidaya dan pembenihan ikan, pengelola UPT PBATP
4. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
   a) Sasaran : Pelaku Usaha dibidang Perikanan Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil Perikanan
5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
   a) Sasaran : Pelaku Usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan

## TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.03 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 5.999.251.000 | | 6.066.000.000 | 80,86 | 6.156.400.000 | 80,91 | 6.282.000.000 | | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 80,66 | 80,71 | 80,76 | 5.999.251.000 | 80,81 | 6.066.000.000 | 80,86 | 6.156.400.000 | 80,91 | 6.282.000.000 | | | Dinas Perikanan |
| 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | 1.673.000.000 | | 1.691.600.000 | 34.621,81 Ton | 1.716.900.000 | 35.314,25 Ton | 1.752.000.0000 | | | |
| | Jumlah produksi perikanan tangkap | 31.985,20 Ton | 32.624,90 Ton | 33.277,40 Ton | 1.673.000.000 | 33.942,95 Ton | 1.691.600.000 | 34.621,81 Ton | 1.716.900.000 | 35.314,25 Ton | 1.752.000.0000 | | | Dinas Perikanan |
| 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | 520.000.000 | | 525.800.000 | | 533.700.000 | | 544.600.000 | | | |
| | Jumlah produksi perikanan budidaya | 15.121,19 Ton | 15.423,61 Ton | 15.732,00 Ton | 520.000.000 | 16.046,73 Ton | 525.800.000 | 16.367,66 Ton | 533.700.000 | 16.695,02 Ton | 544.600.000 | | | Dinas Perikanan |
| 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | 15.000.000 | | 15.200.000 | | 15.500.000 | | 15.900.000 | | | |
| | Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan | 50% | 50% | 50% | 15.000.000 | 50% | 15.200.000 | 50% | 15.500.000 | 50% | 15.900.000 | | | Dinas Perikanan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | 185.000.000 | | 187.000.000 | | 189.900.000 | | 193.800.000 | | | |
| | Jumlah produksi olahan perikanan | 4.102,09 Ton | 4.184,13 Ton | 4.267,81 Ton | 185.000.000 | 4.353,17 Ton | 187.000.000 | 4.440,23 Ton | 189.900.000 | 4.529,04 Ton | 193.800.000 | | | Dinas Perikanan |

## 4.2 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dalam penyusunan Renstra 2025 – 2029 menggunakan 5 Program, 18 Kegiatan dan 48 Sub kegiatan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang diuraiakan pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perikanan kabupaten Probolinggo Tahun 2025- 2029

| Kode | Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun 2024 Awal Perenca-naan | Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Tahun 2027 | | Tahun 2028 | | Tahun 2029 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perikanan | |
| | | | | target | Rp 000,- | target | Rp 000,- | target | Rp 000,- | target | Rp 000,- | target | Rp. 000,- | target | |
| | | | | 7.507.142 | | 8.392.251 | | 8.485.700 | | 8.612.400 | | 8.788.300 | | | |
| | Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Pertanian Dalam Arti Luas | Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,58 | 1,85 | | 2,11 | | 2,38 | | 2,64 | | 2,91 | | 2,91 | Kepala Dinas Perikanan | Kabu-paten Probo-linggo |
| | Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan | 2% | 2% | | 2% | | 2% | | 2% | | 2% | | 10% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.25.03** | **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** | **Jumlah produksi perikanan tangkap** | **31.985,20 Ton** | **32.624,90 Ton** | **461.875** | **33.277,40 Ton** | **1.673.000** | **33.942,95 Ton** | **1.691.600** | **34.621,81 Ton** | **1.716.900** | **35.314,25 Ton** | **1.752.000** | **169.781,31 Ton** | **Bidang Perikanan Tangkap** | **Kabupaten Probolinggo** |
| | Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah | Nilai AKIP PD | 80,66 | 80,71 | | 80,76 | | 80,81 | | 80,86 | | 80,91 | | 80,66 | | |
| **3.25.03.2.01** | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Prosentase wilayah tangkap PUD yang dikelola** | **17,95%** | **20,51 %** | **11.337** | **25,6%** | **313.000** | **30,8%** | **312.000** | **35,9 %** | **312.000** | **41%** | **317.000** | **41%** | **Bidang Perikanan Tangkap** | **Kabupaten Probolinggo** |
| 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia | | | | 12 Dokumen | 63.000 | 12 Dokumen | 62.000 | 12 Dokumen | 62.000 | 12 Dokumen | 62.000 | 48 Dokumen | Bidang Perikanan Tangkap | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 41 Unit | 2 unit | 11.337 | 2 unit | 130.000 | 2 unit | 130.000 | 2 unit | 130.000 | 2 unit | 135.000 | 10 Unit | Bidang Perikanan Tangkap | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | | | | 20 Unit | 120.000 | 20 Unit | 120.000 | 20 Unit | 120.000 | 20 Unit | 120.000 | 80 Unit | Bidang Perikanan Tangkap | Kabupaten Probolinggo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.25.03.2.02** | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Prosentase KUB yang aktif** | **27,15%** | **33,77 %** | **405.000** | **40,40 %** | **990.000** | **47,02 %** | **1.009.600** | **53,64 %** | **1.010.000** | **60,27 %** | **1.040.000** | | **Bidang Perikanan Tangkap** | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 156 Orang | 245 Orang | 405.000 | 90 Orang | 200.000 | 90 Orang | 210.000 | 90 Orang | 210.000 | 90 Orang | 225.000 | 605 Orang | Bidang Perikanan Tangkap | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | | | | 10 Kelompok | 62<br>80.000 | 10 Kelompok | 80.000 | 10 Kelompok | 80.000 | 10 Kelompok | 95.000 | 40 Kelompok | Bidang Perikanan Tangkap | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | 2 Unit | 60.000 | 2 Unit | 60.000 | 3 Unit | 60.000 | 3 Unit | 60.000 | 10 Unit | Bidang Perikanan Tangkap | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.03.2.02.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | | | | 45 Unit | 650.000 | 45 Unit | 659.600 | 60 Unit | 660.000 | 60 Unit | 660.000 | 210 Unit | Bidang Perikanan Tangkap | Kabupaten Probolinggo |
| **3.25.03.2.03** | **Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat** | **NIK 76,61-88,30 B ( Baik )** | **NIK 76,61-88,30 B ( Baik )** | **45.538** | **NIK 76,61-88,30 B ( Baik )** | **230.000** | **NIK 76,61-88,30 B ( Baik )** | **230.000** | **NIK 76,61 - 88,30 B ( Baik )** | **254.900** | **NIK 76,61 - 88,30 B ( Baik )** | **255.000** | **NIK 76,61-88,30 B ( Baik )** | **Bidang Perikanan Tangkap** | **Kabupaten Probolinggo** |
| 3.25.03.2.03.0001 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | 3 SOP | 50.000 | 3 SOP | 50.000 | 3 SOP | 65.000 | 3 SOP | 65.000 | 12 SOP | Bidang Perikanan Tangkap | Kabupaten Probolinggo |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 6 Layanan | 6 Layanan | 45.538 | 6 Layanan | 180. 000 | 6 Layanan | 180.000 | 6 Layanan | 189.900 | 6 Layanan | 190.000 | 30 Layanan | Bidang Perikanan Tangkap | Kabupaten Probolinggo |
| **3.25.03.2.04** | **Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota** | **Prosentase kapal yang mempunyai dokumen kapal** | **-** | **-** | **0** | **24,26 %** | **140.000** | **25,77 %** | **140.000** | **27,29 %** | **140.000** | **28,81 %** | **140.000** | **28,81%** | **Bidang Perikanan Tangkap** | **Kabupaten Probolinggo** |
| 3.25.03.2.04.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia | - | - | 0 | 12 Dokumen | 140.000 | 12 Dokumen | 140.000 | 12 Dokumen | 140.000 | 12 Dokumen | 140.000 | 48 Dokumen | Bidang Perikanan Tangkap | |
| **3.25.04** | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | **Jumlah produksi perikanan budidaya** | **15.121,19 Ton** | **15.423,61 Ton** | **222.175** | **15.732,00 Ton** | **520.000** | **16.046,73 Ton** | **525.800** | **16.367,66 Ton** | **533.700** | **16.695,02 Ton** | **544.600** | **95.386,21 Ton** | **Bidang Perikanan Budidaya** | **Kabupaten Probolinggo** |
| **3.25.04.2.02** | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **Persentase kelompok pembudidaya ikan yang aktif** | **6,67** | **6,8%** | **135.385** | **7,77%** | **135.385,2** | **8,74%** | **165.000** | **9,71 %** | **170.800** | **10,68 %** | **179.600** | **10,68%** | **Bidang Perikanan Budidaya** | **Kabupaten Probolinggo** |
| 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 15 Kelompok | 3 Kelompok | 105.850 | 3 Kelompok | 54.000 | 3 Kelompok | 59.800 | 3 Kelompok | 59.800 | 3 Kelompok | 65.000 | 15 Kelompok | Bidang Perikanan Budidaya | Kabupaten Probolinggo |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | | | | 3 Kelompok | 31.000 | 3 Kelompok | 31.000 | 3 Kelompok | 31.000 | 3 Kelompok | 31.000 | 12 Kelompok | Bidang Perikanan Budidaya | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya | | | | 5 Kelompok | 30.000 | 5 Kelompok | 30.000 | 5 Kelompok | 30.000 | 5 Kelompok | 30.000 | 20 kelompok | Bidang Perikanan Budidaya | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 12 Kelompok | 3 Kelompok | 29.535 | 5 Kelompok | 50.000 | 5 Kelompok | 50.000 | 5 Kelompok | 50.000 | 5 Kelompok | 53.600 | 23 Kelompok | Bidang Perikanan Budidaya | Kabupaten Probolinggo |
| **3.25.04.2.04** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **Persentase pokdakan penerima manfaat Sarana dan prasarana budidaya ikan** | **30,58%** | **32,04 %** | **86.790** | **36,41 %** | **355.000** | **40,78 %** | **355.00** | **45,15 %** | **362.900** | **49,51 %** | **365.000** | **49,51%** | **Bidang Perikanan Budidaya** | **Kabupaten Probolinggo** |
| 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 12 Dokumen | 25.000 | 12 Dokumen | 25.000 | 12 Dokumen | 25.000 | 12 Dokumen | 25.000 | 48 Dokumen | Bidang Perikanan Budidaya | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam | 4 Dokumen | 12 Dokumen | 9.880 | 12 Dokumen | 50.000 | 12 Dokumen | 50.000 | 12 Dokumen | 50.000 | 12 Dokumen | 50.000 | 60 Dokumen | Bidang Perikanan Budidaya | Kabupaten |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | | | | | | | | | | | | | | Probo-linggo |
| 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 6 Unit | 4 Unit | 76.910 | 6 Unit | 150.000 | 6 Unit | 150.000 | 6 Unit | 157.900 | 6 Unit | 160.000 | 28 Unit | Bidang Perikanan Budidaya | Kabu-paten Probo-linggo |
| 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | 20 Unit | 30.000 | 20 Unit | 30.000 | 20 Unit | 30.000 | 20 Unit | 30.000 | 5 dokumen | Bidang Perikanan Budidaya | Kabu-paten Probo-linggo |
| 3.25.04.2.04.0011 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan | | | | 1 Unit | 50.000 | 1 Unit | 50.000 | 1 Unit | 50.000 | 1 Unit | 50.000 | | Bidang Perikanan Budidaya | Kabu-paten Probo-linggo |
| 3.25.04.2.04.0013 | Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan | Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia | | | | 5 Unit | 50.000 | 2 Unit | 50.000 | 2 Unit | 50.000 | 2 Unit | 50.000 | | Bidang Perikanan Budidaya | Kabu-paten Probo-linggo |
| **3.25.05** | **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan** | **Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan** | **50%** | **50%** | **12.900** | **50%** | **15.000** | **50%** | **15.200** | **50%** | **15.500** | **50%** | **15.900** | **50%** | **Bidang Bina Usaha Perikanan** | **Kabu-paten Probo-linggo** |
| **3.25.05.2.01** | **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang** | **Persentase usaha perikanan tangkap dan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air** | **2%** | **2%** | **12.900** | **2%** | **15.000** | **2%** | **15.200** | **2%** | **15.500** | **2%** | **15.900** | **10%** | **Bidang Bina Usaha Perikanan** | **Kabu-paten Probo-linggo** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Dapat Diusahakan Dalam Kab/ Kota** | **lainnya yang diawasi** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.05.2.01.0004 | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota | 56 Pelaku Usaha | 28 Pelaku Usaha | 4.400 | 30 Pelaku Usaha | 5.000 | 30 Pelaku Usaha | 5.000 | 30 Pelaku Usaha | 5.000 | 30 Pelaku Usaha | 5.000 | 148 Pelaku Usaha | Bidang Bina Usaha Perikanan | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.05.2.01.0006 | Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesua kewenangan kabupaten/kota | | | | 20 Pelaku Usaha | 5.000 | 30 Pelaku Usaha | 5.000 | 30 Pelaku Usaha | 5.000 | 30 Pelaku Usaha | 5.000 | 110 Pelaku Usaha | Bidang Bina Usaha Perikanan | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.05.2.01.0007 | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | 52 Pelaku Usaha | 25 Pelaku Usaha | 8.500 | 30 Pelaku Usaha | 5.000 | 30 Pelaku Usaha | 5.000 | 30 Pelaku Usaha | 5.000 | 30 Pelaku Usaha | 5.000 | 145 Pelaku Usaha | Bidang Bina Usaha Perikanan | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.05.2.01.0008 | Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan | Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan | | | | | | | | | | 1 Unit | 100 | 1 Unit | Bidang Bina Usaha Perikanan | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.05.2.01.0009 | Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk | | | | | | 1 Orang | 100 | 1 Orang | 200 | 1 Orang | 200 | 3 Orang | Bidang Bina Usaha Perikanan | Kabupaten Probolinggo |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.05.2.01.0010 | Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kab/kota | Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani | | | | | | 1 Perkara | 100 | 1 Perkara | 300 | 1 Perkara | 300 | 3 Perkara | Bidang Bina Usaha Perikanan | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.05.2.01.0011 | Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan | Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun | | | | | | | | | | 1 Unit | 100 | 1 Unit | Bidang Bina Usaha Perikanan | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.05.2.01.0012 | Pengawasan Ekstraksi Garam | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kab /kota, yang diperiksa kepatuhannya | | | | | | | | | | 1 Pelaku Usaha | 100 | 1 Pelaku Usaha | Bidang Bina Usaha Perikanan | Kabupaten Probolinggo |
| **3.25.06** | **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** | **Jumlah produksi olahan perikanan** | **4.102,09 Ton** | **4.184,13 Ton** | **278.420** | **4.267,81 Ton** | **185.000** | **4.353,17 Ton** | **187.000** | **4.440,23 Ton** | **189.900** | **4.529,04 Ton** | **193.800** | **21.774,38 Ton** | **Bidang Bina Usaha Perikanan** | **Kabupaten Probolinggo** |
| **3.25.06.2.01.** | **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil** | **Persentase unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan usaha skala mikro dan kecil yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)** | **9,72%** | **14,02 %** | **13.930** | **18%** | **35.000** | **22,61 %** | **35.000** | **26,91 %-** | **36.000** | **31,21 %** | **37.000** | **31,21%** | **Bidang Bina Usaha Perikanan** | **Kabupaten Probolinggo** |
| 3.25.06.2.01.0004 | Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala | Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan | 100 Rekomendasi | 100 Rekomendasi | 9.630 | 100 Rekomendasi | 14.000 | 100 Rekomendasi | 14.000 | 100 Rekomendasi | 15.000 | 100 Rekomendasi | 15.000 | 500 Rekomendasi | Bidang Bina Usaha Perikanan | Kabupaten Probolinggo |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | usaha dan tingkat risiko | skala usaha dan tingkat risiko | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.06.2.01.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.300 | 12 Dokumen | 21.000 | 12 Dokumen | 21.000 | 12 Dokumen | 21.000 | 12 Dokumen | 22.000 | 60 Dokumen | Bidang Bina Usaha Perikanan | Kabupaten Probolinggo |
| **3.25.06.2.02** | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | **Persentase peningkatan sertifikasi mutu produk olahan hasil perikanan** | **0,5%** | **0,5%** | **35.990** | **0,5%** | **50.000** | **0,5%** | **51.000** | **0,5%** | **52.000** | **0,5%** | **53.000** | **0,5%** | **Bidang Bina Usaha Perikanan** | **Kabupaten Probolinggo** |
| 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 90 Unit Usaha | 70 Unit Usaha | 35.990 | 40 Unit Usaha | 50.000 | 40 Unit Usaha | 51.000 | 40 Unit Usaha | 52.000 | 40 Unit Usaha | 53.000 | | Bidang Bina Usaha Perikanan | Kabupaten Probolinggo |
| **3.25.06.2.03** | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu)** | **Persentase pemenuhan bahan baku Unit Pengolahan Ikan** | **0,32%** | **0,33%** | **228.500** | **0,34%** | **100.000** | **0,35%** | **101.100** | **0,36 %** | **101.900** | **0,37 %** | **103.800** | **0,37%** | **Bidang Bina Usaha Perikanan** | **Kabupaten Probolinggo** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0,44 Ton | 0,1 Ton | 59.600 | 100 Ton | | 100 Ton | 51.000 | 100 Ton | 51.800 | 100 Ton | 52.800 | | Bidang Bina Usaha Perikanan | Kabupaten Probolinggo |
| 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 28 Pelaku Usaha | 41 Pelaku Usaha | 168.900 | 20 Pelaku Usaha | 50.000 | 20 Pelaku Usaha | 50.100 | 20 Pelaku Usaha | 50.100 | 20 Pelaku Usaha | 51.000 | | Bidang Bina Usaha Perikanan | Kabupaten Probolinggo |
| **3.25.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Nilai LHE AKIP PD** | **80,66** | **80,71** | **6.531.771** | **80,76** | **5.999.251** | **80,81** | **6.066.000** | **80,86** | **6.156.400** | **80,91** | **6.282.000** | **80,91** | **Sekretariat Dinas** | **Kantor DISKAN** |
| **3.25.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun** | **13 Dokumen** | **13 Dokumen** | **272.227** | **13 Dokumen** | **10.000** | **13 Dokumen** | **10.000** | **13 Dokumen** | **14.000** | **13 Dokumen** | **94.000** | **65 Dokumen** | **Sekretariat Dinas** | **Kantor DISKAN** |
| 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 268.042 | 6 Dokumen | 5.000 | 6 Dokumen | 5.000 | 6 Dokumen | 7.000 | 6 Dokumen | 7.000 | | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 Laporan | 5.000 | | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.185 | 4 Laporan | 5.000 | 4 Laporan | 5.000 | 4 Laporan | 7.000 | 4 Laporan | 7.000 | | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | JJumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 Dokumen | 75.000 | | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| **3.25.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun** | **100%** | **100%** | **4.980.426** | **100%** | **4.968.651.70** | **100%** | **4.923.400** | **100%** | **4.940.400** | **100%** | **4.935.400** | **100** | **Sekretariat Dinas** | **Kantor DISKAN** |
| 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 476 Orang/ bulan | 476 Orang / bulan | 4.960.221 | 476 Orang / bulan | 4.955.651 | 476 Orang/ bulan | 4.910.400 | 476 Orang/ bulan | 4.910.400 | 476 Orang/ bulan | 4.905.400 | 2.380 Orang/ bulan | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 13.648 | 12 Dokumen | 5.0000 | 12 Dokumen | 5.0000 | 12 Dokumen | 15.000 | 12 Dokumen | 15.000 | 60 Dokumen | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji-an/Verifikasi Keuangan SKPD | 200 Dokumen | 150 Dokumen | 4.120 | 100 Dokumen | 5.0000 | 100 Dokumen | 5.0000 | 100 Dokumen | 7.000 | 100 Dokumen | 7.000 | 550 Dokumen | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 12 Dokumen | 5.0000 | 12 Dokumen | 5.0000 | 24 Dokumen | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.437 | 12 Dokumen | 3.000 | 12 Dokumen | 3.000 | 12 Dokumen | 3.000 | 12 Dokumen | 3.000 | 49 Dokumen | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| **3.25.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase barang milik daerah DKP terkelola** | **-** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **12 Dokumen** | **5.000** | **12 Dokumen** | **5.000** | **24 Dokumen** | **Sekretariat Dinas** | **Kantor DISKAN** |
| 3.25.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 12 Laporan | 5.000 | 12 Laporan | 5.000 | 24 Laporan | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| **3.25.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Kepegawaian DKP Terlaksana** | **-** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **12 Dokumen** | **25.000** | **12 Dokumen** | **25.000** | **24 Dokumen** | **Sekretariat Dinas** | **Kantor DISKAN** |
| 3.25.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 12 Dokumen | 5.000 | 12 Dokumen | 5.000 | 24 Dokumen | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 Orang | 20.000 | 2 Orang | 20.000 | 4 Orang | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| **3.25.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana** | **100%** | **100 %** | **163.154** | **100 %** | **131.600** | **100%** | **135.600** | **100 %** | **134.600** | **100 %** | **149.600** | **100%** | **Sekretariat Dinas** | **Kantor DISKAN** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 4 Paket | 1.600 | 5 Paket | 1.600 | 5 Paket | 1.600 | 5 Paket | 1.600 | 5 Paket | 1.600 | 24 Paket | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Paket | 24 Paket | 9.982 | 20 Paket | 5.000 | 25 Paket | 5.000 | 30 Paket | 6.000 | 30 Paket | 6.000 | 129 Paket | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 24 Paket | 24 Paket | 10.285 | 19 Paket | 5.000 | 19 Paket | 5.000 | 24 Paket | 7.000 | 24 Paket | 7.000 | 110 Paket | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 98.339 | 12 Paket | 76.000 | 12 Paket | 80.000 | 12 Paket | 70.000 | 12 Paket | 80.000 | 60 Paket | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 4 Paket | 3.618. | 4 Paket | 4.0000 | 4 Paket | 4.0000 | 5 Paket | 5.000 | 5 Paket | 5.000 | 22 paket | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 150 Laporan | 39.329 | 100 Laporan | 40.000 | 100 Laporan | 40.000 | 110 Laporan | 45.000 | 115 Laporan | 50.000 | 575 Laporan | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| **3.25.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pengadaan Barang Milik Daerah** | **-** | **100%** | **0** | **100%** | **10.000** | **100%** | **10.000** | **100 %** | **92.400** | **100 %** | **116.000** | **100%** | **Sekretariat Dinas** | **Kantor DISKAN** |
| 3.25.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | - | 1 Unit | 9.026 | 1 Unit | 10.000 | 1 Unit | 10.000 | 2 Unit | 20.000 | 3 Unit | 30.000 | 8 Unit | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 Unit | 72.400 | 1 Unit | 86.000 | 2 Unit | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| **3.25.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **24 Laporan** | **24 Laporan** | **824.218** | **24 Laporan** | **826.000** | **24 Laporan** | **830.000** | **24 Laporan** | **830.000** | **24 Laporan** | **830.000** | **120 Laporan** | **Sekretariat Dinas** | **Kantor DISKAN** |
| 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 151.320 | 12 Laporan | 150.000 | 12 Laporan | 150.000 | 12 Laporan | 150.000 | 12 Laporan | 150.000 | 60 Laporan | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 672.897 | 12 Laporan | 676.000 | 12 Laporan | 680.000 | 12 Laporan | 680.000 | 12 Laporan | 680.000 | 60 Laporan | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| **3.25.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara** | **52 Unit** | **52 Unit** | **282.718** | **52 Unit** | **53.000** | **61 Unit** | **157.000** | **61 Unit** | **115.000** | **66 Unit** | **127.000** | **292 Unit** | **Sekretariat Dinas** | **Kantor DISKAN** |
| 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 3 Unit | 66.900. | 3 Unit | 48.000 | 5 Unit | 50.000 | 5 Unit | 50.000 | 5 Unit | 50.000 | 21 Unit | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 49 Unit | 49 Unit | 15.840 | 49 Unit | 5.000 | 55 Unit | 7.000 | 55 Unit | 5.000 | 60 Unit | 7.000 | 268 Unit | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| 3.25.01.2.09.0009 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | - | - | | - | 0 | 1 Unit | 100.000 | 1 Unit | 60.000 | 1 Unit | 70.000 | 3 Unit | Sekretariat Dinas | Kantor DISKAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 4.3 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Secara keseluruhan, program-program Dinas Lingkungan hidup merupakan program prioritas, karena akan selalu berkaitan satu sama lain dalam hal pencapaian target sasaran Perangkat Daerah. Namun, dalam dokumen RPJMD 2025-2029, Program Prioritas ekonomi masyarakat yang berkelanjutan disebut dengan istilah SAE Ekonomi.

Secara eksplisit, Program Prioritas Dinas Perikanan dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

**TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **Dinas Perikanan** | | | | |
| 1. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Rekomendasi pembelian BBM bersubsidi Untuk nelayan dan pembudidaya tradisional<br><br>Pelestarian sumberdaya ikan lokal di perairan umum daratan; Rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove). | Peyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangap | SAE Layanan<br><br>SAE Lingkungan |
| | | Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan; Melakukan diversifikasi usaha nelayan; Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan<br><br>Fasilitasi konflik antar nelayan melalui kearifan lokal; Melakukan kegiatan gathering nelayan dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | SAE Pendapatan Keluarga mendukung<br><br>SAE Kebhinekaan |
| | | Melakukan pelayanan UPT TPI Paiton dan Randuputih kepada nelayan | Pelayanan Penyelenggara-an Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | SAE Layanan |
| 2. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pembudidaya; Penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | SAE Pendapatan Keluarga mendukung |
| | | Pengembangan budidaya berbasis kawasan; Diseminasi, inovasi dan teknologi budidaya ikan | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | SAE Pendapatan Keluarga mendukung |
| | | Melakukan pelayanan pengukuran kualitas air kepada pembudidaya air tawar | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | SAE Layanan |
| | | Melakukan pelayanan UPT Budidaya (penyediaan benih ikan air tawar) | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | SAE Layanan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pengolah dan pemasar ikan; Fasilitasi perijinan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | SAE Pendapatan Keluarga mendukung SAE Perempuan Berdaya Saing |
| | | Melakukan diversifikasi olahan hasil perikanan | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | SAE Perempuan Berdaya Saing |
| | | Gerakan memasyarakatkan makan ikan | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | SAE Pendapatan Keluarga mendukung SAE Perempuan Berdaya Saing |
| | | Penyediaan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar ikan | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | SAE Pendapatan Keluarga mendukung 2. SAE Perempuan Berdaya Saing |

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan serta menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo menetapkan tiga program prioritas utama. Program-program tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis daerah serta selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, perlindungan ekosistem perairan, dan penguatan kelembagaan ekonomi perikanan.

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan kecil melalui penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, penguatan kelembagaan nelayan, serta peningkatan mutu layanan publik di sektor perikanan tangkap.

Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini meliputi penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan, serta fasilitasi penyelesaian konflik antar-nelayan berbasis kearifan lokal. Selain itu, kegiatan pelestarian sumber daya ikan lokal di perairan umum daratan dan rehabilitasi ekosistem pesisir, seperti penanaman mangrove, dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga daya dukung lingkungan perikanan.

78

Pelayanan kepada masyarakat nelayan juga ditingkatkan melalui optimalisasi pelayanan UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paiton dan

Randuputih, guna menjamin transparansi dan efisiensi dalam proses pelelangan hasil tangkapan.

Secara umum, pelaksanaan program ini berkontribusi terhadap peningkatan layanan publik (SAE Layanan), pelestarian lingkungan (SAE Lingkungan), peningkatan pendapatan keluarga (SAE Pendapatan Keluarga Mendukung), serta penguatan harmoni sosial dalam masyarakat pesisir (SAE Kebhinekaan).

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya diarahkan untuk memperkuat sektor perikanan budidaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir dan pedesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing usaha budidaya ikan melalui penerapan teknologi, peningkatan kapasitas pembudidaya, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pengembangan kawasan budidaya berbasis inovasi dan teknologi, serta pemberian pendampingan dan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Selain itu, Dinas Perikanan juga menyelenggarakan kegiatan pengukuran kualitas air dan pengelolaan kesehatan ikan secara rutin guna menjaga kelestarian lingkungan budidaya.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Budidaya turut berperan aktif dalam menjamin ketersediaan benih ikan air tawar melalui kegiatan penjaminan sarana pembudidayaan ikan di tingkat kabupaten.

Pelaksanaan program ini mendukung peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan produktif (SAE Pendapatan Keluarga Mendukung) sekaligus memperkuat sistem layanan publik perikanan (SAE Layanan).

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan difokuskan pada peningkatan nilai tambah, mutu, dan daya saing produk perikanan lokal. Tujuan utama program ini adalah memperluas akses pasar, memperkuat kelembagaan ekonomi pelaku usaha perikanan, serta meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif di sektor perikanan.

Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai standar usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan penerapan persyaratan perizinan berusaha

berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko, serta pengembangan diversifikasi produk olahan hasil perikanan.

Selain itu, Dinas Perikanan melaksanakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagai upaya peningkatan konsumsi ikan dan penguatan gizi masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan serta pemasaran hasil perikanan juga dilakukan untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil.

Program ini mendukung penguatan peran perempuan dalam ekonomi (SAE Perempuan Berdaya Saing) sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan dan pengolah ikan (SAE Pendapatan Keluarga Mendukung). Dengan adanya program ini, diharapkan terjadi peningkatan kemandirian pelaku usaha perikanan serta pertumbuhan sektor pengolahan yang berkelanjutan dan berorientasi pasar.

Dapat disimpulkan Ketiga program prioritas tersebut merupakan pilar utama dalam rencana aksi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Probolinggo. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, Dinas Perikanan berupaya menciptakan sistem pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan serta dinamika pasar. Dengan demikian, implementasi program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi pesisir, menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan, serta mewujudkan masyarakat perikanan Kabupaten Probolinggo yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 1 | Produksi Perikanan Tangkap | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (Produksi Perikanan Tangkap/ Target Produksi Perikanan Tangkap) x 100% |
| 2 | Produksi Perikanan Budi Daya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (Produksi Perikanan Budidaya/ Target Produksi Perikanan Budidaya) x 100% |
| | | | | | | | | | |

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai tolok ukur utama keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKK ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja pembangunan sektor perikanan secara konsisten dan berkelanjutan.

Pertama, indikator Produksi Perikanan Tangkap diukur dalam bentuk persentase, yakni perbandingan antara realisasi produksi perikanan tangkap dengan target produksi perikanan tangkap yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Target kinerja ditetapkan sebesar 100% setiap tahun mulai 2025 hingga 2030. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan produktivitas nelayan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan kelembagaan nelayan.

Kedua, indikator Produksi Perikanan Budidaya juga diukur dalam bentuk persentase, yakni perbandingan antara realisasi produksi budidaya dengan target produksi yang ditetapkan. Sama halnya dengan perikanan tangkap, target kinerja ditetapkan sebesar 100% per tahun dari 2025 sampai 2030. Target ini menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan pengembangan budidaya ikan diarahkan agar mampu mencapai target produksi secara optimal, melalui dukungan penyediaan benih unggul, pakan berkualitas, inovasi teknologi budidaya, serta penerapan prinsip ramah lingkungan.

Dengan penetapan dua indikator kinerja kunci ini, Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo memiliki instrumen pengendalian kinerja yang jelas dan terukur untuk memastikan tercapainya sasaran strategis pembangunan perikanan, sekaligus memberikan jaminan keberlanjutan dan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 4.5 lndikator Kinerja Utama PD

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (11 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| | **Indikator Tujuan** | | | | | | | | |
| 1. | Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Persen (%) | 1,85 | 2,11 | 2,38 | 2,64 | 2,91 | 3,17 | |
| | **Indikator Sasaran** | | | | | | | | |
| 3. | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan | Persen (%) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | Formula perhitungannya yaitu (( Σproduksi perikanan tahun n - Σproduksi perikanan tahun n-1)/ Σproduksi perikanan tahun n-1 )*100 |
| 4. | Nilai AKIP PD | Nilai | 80,71 | 80,76 | 80,81 | 80,86 | 80,91 | 80,96 | |
| | | | | | | | | | |

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan strategis perangkat daerah dalam mendorong pengembangan sektor perikanan sebagai salah satu potensi unggulan daerah.

IKU yang digunakan adalah **Persentase Peningkatan Produksi Perikanan**, yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Formula perhitungannya adalah:

$$\text{Persentase Peningkatan Produksi Perikanan} = \frac{(\sum \text{Produksi Perikanan Tahun n} - \sum \text{Produksi Perikanan Tahun n-1})}{\sum \text{Produksi Perikanan Tahun n-1}} \times 100$$

Target kinerja ditetapkan sebesar **2% setiap tahun** mulai dari 2025 hingga 2030. Penetapan target yang konsisten ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menjaga tren pertumbuhan produksi perikanan secara berkelanjutan, baik pada subsektor perikanan tangkap maupun budidaya.

82

Melalui pencapaian indikator ini, diharapkan sektor perikanan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudi daya, maupun pelaku

usaha pengolahan hasil perikanan, serta mendukung pertumbuhan PDRB pertanian dalam arti luas. Dengan demikian, IKU ini menjadi tolok ukur utama bagi keberhasilan implementasi Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo periode 2025–2029.

# BAB V PENUTUP

## 5.1. Pokok-pokok Rencana Strategi Dinas Perikanan

- Renstra Dinas Perikanan ini memuat 1 Tujuan, 1 Sasaran, 5 program 18 kegiatan, dan 59 Sub kegiatan, dimana setiap elemen telah dirumuskan indikatornya dan mengacu kepada Perencanaan ditingkat Kabupaten Probolinggo.
- Rencana Strategis Dinas Perikanan ini diharapkan menguatkan peran para pemangku kepentingan serta partisipasi publik dalam urusan Perikanan, Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pemangku Kepentingan yang terkait dengan urusan Perikanan Kabupaten Probolinggo antara lain Bapelitbangda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa, Dinas Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, Perindustrian, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
- Renstra berlaku selama tahun 2025-2029 selama Dinas Perikanan masih ada, dan tidak berlaku jika Dinas Perikanan sudah berubah nomenklatur Dinas Perikanan berubah.

## 5.2. Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan

- Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo ini diharapkan dapat dikoordinasikan dan disosialisasi kepada para pemangku kepentingan yang terkait sehingga dapat tercipta sinergi pada urusan Perikanan.
- Renstra SKPD Dinas Perikanan sebagai arah dalam pelaksanaan Musrenbang, diharapkan akan terjadi sinkronisasi yang tepat dalam pengusulan kegiatan yang mulai dilakukan dari tingkat desa. Melibatkan pemerintah desa, karena desa tidak memiliki kemampuan teknis berdasarkan kompetensinya, namun memiliki kewenangan untuk implementasi dan anggaran di tingkat desa.

- Penjabaran Lebih lanjut Renstra Dinas Perikanan disusun melalui Renja Dinas Perikanan. Dalam hal pelaksanaan Renstra ini mengalami perubahan sasaran tahunan, yang disebabkan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, diupayakan tidak mengubah target tujuan pada akhir periode pada tahun 2029.
- Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo.
- Perubahan Renstra akibat atas penyesuaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah beserta indikator kinerjanya, dan penataan kelembagaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui Peraturan Bupati.
- Indikator Kinerja Utama akan menjadi acuan bagi Dinas Perikanan dalam menjabarkan indikator kinerja individu masing-masing eselon dan jabatan fungsional umum secara berjenjang.
- Pemanfaatan teknologi digital untuk kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan urusan Perikanan. Terutama peningkatan koordinasi antara ke semua tingkatan instansi hingga ke desa.

## 5.3 Pelaksanaan Pengendalian

- Pengendalian kinerja pelaksanaan Rencana Strategis dengan melakukan penyusunan SPIP (*Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan*) dimana pada setiap subkegiatan perlu dirumuskan tujuannya sehingga dapat dibuatkan register management resiko untuk menjamin keberhasilannya.
- Sebagai lanjutan penyusunan SPIP perlu juga disusun Proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur terutama dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat.

## 5.4 Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan Perikanan



- Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan melalui laporan konsistensi RKPD terhadap RPJMD, Renja terhadap Renstra, Renja terhadap APBD Kabupaten Probolinggo. Sehingga dapat diketahui capaian Renstra DKP TA 2025-2029.

- Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data yang telah diverifikasi, divalidasi, dan dibandingkan dengan data sektor lain.

Probolinggo, 26 September 2025

**KEPALA DINAS PERIKANAN**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**ACHMAD ARUMAN, S.Sos, MM**
Pembina Utama
NIP. 19670926 198809 1 001

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

# DINAS PERTANIAN

## TAHUN 2025-2029

**DINAS PERTANIAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**2025**

# KATA PENGANTAR

Pemendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020 memberikan konsekuesi perubahan nomenklatur organisasi dan program, kegiatan serta sub kegiatan, sehingga harus dilakukan penggabungan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Dinas Pertanian. Adapun juga perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk Tahun 2025-2029 yang merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif. Disini urusan pertanian mencakup subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, dan subsektor perternakan dikelola Dinas Pertanian. Sehingga harus disusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian untuk periode 2025-2029.

Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pertanian Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pertanian Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pertanian dengan BAPELITBANGDA dan pemangku kepentingan terkait.

Probolinggo, 27 September 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**ARIF KURNIADI, SP, MM**
Pembina Tingkat I
NIP. 19710103 199903 1 003

## DAFTAR ISI


DAFTAR ISI ..... i

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

1. Latar Belakang ..... 1
2. Landasan Hukum ..... 3
3. Maksud dan Tujuan ..... 8
4. Sistematika Penulisan ..... 10

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**..... 12

1 Subbab Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian..... 12

a. Tugas, Fungsi dan Struktur..... 12
b. Sumber Daya ..... 24
c. Kinerja Pelayanan; dan ..... 34
d. Tantangan dan Peluang ke depan..... 44

2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis ..... 52

a. Permasalahan Pelayanan..... 52
b. Isu Strategis RPJMD..... 86
c. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur..... 87
d. Isu Strategis RTRW..... 89
e. Isu Startegis KLHS..... 89

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....** 93

1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah..... 93

a. Matrik tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan PD..... 94
b. Uraian tujuan dan sasaran disertai indicator..... 98
c. Uraian Definisi Operasional serta Formula Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran..... 99

2 Strategi dan Arah Kebijakan..... 101
a. Penentuan Strategi..... 101
b. Penahapan Pembangunan..... 106
c. Lokus Renstra..... 108
d. Arah Kebijakan..... 109
**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANIAN.....** 112
1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja..... 112
a. Uraian pengantar dan Matrik Perumusan Program/ Kegiatan/Subkegiatan dan indikator kinerja..... 112
b. Uraian Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator Program/Kegiatan /Subkegiatan..... 128
2. Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, Target, dan Pendanaan Indikatif..... 152
a. Matrik Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan..... 152
3. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 181
**BAB V PENUTUP .....** 187

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berpedoman pada Misi 2 RPJMD 2025–2029, yaitu *"SAE Ekonomi"*, menekankan pada penguatan ekonomi lokal melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Tujuan pembangunan daerah dalam misi ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berdaya saing dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah (target 2025–2029: 5,09%–5,61%).

Sasaran yang lebih spesifik bagi sektor pertanian adalah peningkatan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan target meningkat dari 1,85% pada 2025 menjadi 2,91% pada 2029. Sasaran ini kemudian dijabarkan dalam Renstra Dinas Pertanian melalui indikator kinerja utama (IKU), antara lain:

1. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (target 3% per tahun).
2. Persentase peningkatan produksi hortikultura (target 1,5% per tahun).
3. Persentase peningkatan produksi perkebunan (target 1% per tahun).
4. Persentase peningkatan produksi dan populasi peternakan (target 1% per tahun).

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Pertanian secara langsung mendukung pertumbuhan PDRB sektor pertanian, yang pada gilirannya menopang pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Selain itu Renstra Dinas Pertanian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pertanian juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pertanian Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pertanian berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Pertanian.

## 2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diperbaharui/sebagian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2045;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029;
34. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja PD.

## 3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Dinas Pertanian untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pertanian sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Dinas Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian untuk kurun waktu 5 tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pertanian dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pertanian tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.

**4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan ; dan
4. Sistematika Penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD**

1. Subbab Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian :
   a. Tugas, Fungsi dan Struktur;
   b. Sumber Daya;
   c. Kinerja Pelayanan; dan
   d. Kelompok Sasaran lainnya
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian:
   a. Permasalahan Pelayanan;
   b. Isu Strategis.

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. Tujuan;
2. Sasaran;
3. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran;
4. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANIAN**

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;

3. Uaraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 melalui IKU Dinas Pertanian.
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui IKK

**BAB V. PENUTUP**

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

## 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah :

### a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas bidang urusan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang pertanian
b. pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian
d. pelaksanaan administrasi
e. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja PD adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Sarana, Penyuluhan Dan Pengendalian Pertanian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Prasarana Dan Perizinan Pertanian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Bina Usaha Peternakan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pertanian

Kepala Dinas Pertanian sesuai Pasal 218 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (2) sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan dibidang Pertanian;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang Pertanian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pertanian;
d. pelaksanaan administrasi;
e. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pertanian

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem pengendalian Intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah/negara, kearsipan dan dokumentasi;
f. penyusunan, pelaksanaan, perorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

### 1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
c. penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
d. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
e. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
f. penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan administrasi rencana program/ kegiatan/ anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/ kegiatan/ anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Sarana, Penyuluhan Dan Pengendalian Pertanian

(1) Kepala Bidang Sarana, Penyuluhan dan Pengendalian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis Pengawasan Sarana Pertanian, Penyuluhan Pertanian dan Pengendalian Pertanian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana, Penyuluhan, dan Pengendalian Bencana Pertanian, mempunyai fungsi :
    a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis bidang Pengawasan Sarana Pertanian, Penyuluhan Pertanian dan Pengendalian Pertanian;
    b. penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan bidang Pengawasan Sarana Pertanian, Penyuluhan Pertanian dan Pengendalian Pertanian;
    c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana Pertanian, prasarana dan Sarana Penyuluhan Pertanian dan Pengendalian Pertanian;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Sarana Pertanian, Penyuluhan Pertanian dan Pengendalian Pertanian;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Prasarana Dan Perizinan Pertanian

(1) Kepala Bidang Prasarana dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis Pengembangan dan Pembangunan Prasarana Pertanian serta Perizinan Usaha Pertanian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana dan Perizinan Pertanian mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis bidang Pengembangan dan Pembangunan Prasarana Pertanian serta Perizinan Usaha Pertanian;
b. penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan bidang Pengembangan dan Pembangunan Prasarana Pertanian serta Perizinan Usaha Pertanian;
c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan Pengembangan dan Pembangunan Prasarana Pertanian serta Perizinan Usaha Pertanian;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Prasarana Pertanian serta Perizinan Usaha Pertanian;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Bina Usaha Peternakan

(1) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Bina Usaha Peternakan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Bina Usaha Peternakan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang Prasarana, Sarana dan Bina Usaha Peternakan;
b. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan, penyediaan, penataan dan intensifikasi dibidang Prasarana, Sarana dan Bina Usaha Peternakan;
c. pengawasan, pengujian, pengendalian peredaran dan penggunaan mutu benih/bibit/pakan ternak serta penyebaran pengembangan ternak;
d. pemberian bimbingan penerapan teknis, peningkatan budidaya, populasi dan produksi ternak;
e. pembinaan, pengelolaan dan penataan sumber bibit/sumber daya genetik ternak, penyediaan pakan ternak serta pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, pengolahan hasil peternakan, fasilitasi kelembagaan, permodalan dan manajemen usaha peternakan;
f. pemberian informasi pelayanan dan rekomendasi teknis perijinan kepada pelaku usaha peternakan;

g. pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang peternakan serta fasilitasi promosi produk hasil peternakan;
h. pemantauan dan evaluasi dibidang Prasarana, Sarana dan Bina Usaha Peternakan;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

(1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
b. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
c. pengawasan obat hewan ditingkat pengecer (depo, toko, ritel, sub distributor);
d. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan;
e. pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik;
f. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
g. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;

h. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
i. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
j. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
k. penyiapan bahan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan;
l. penyiapan bahan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah;
m. penyiapan bahan Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan;
n. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
o. penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan standard teknis operasional pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
p. penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
q. pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
r. penerapan dan pengawasan pelaksanaan standar teknis pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
s. penyiapan bahan penilaian penerapan hygiene dan sanitasi unit usaha hewan dan produk hewan;
t. pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha hewan dan produk hewan;
u. penyiapan bahan pengawasan peredaran hewan dan produk

hewan;

v. penyiapan bahan penetapan pemenuhan persyaratan teknis kesmavet;
w. penyiapan bahan pencegahan dan penularan zoonosis;
x. penyiapan bahan bimbingan rumah potong hewan dan pemotongan hewan qurban;
y. pemantauan, evaluasi pelaksanaan, penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan;
z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsionl

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja PD, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI**

**DINAS PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

**LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 14 TAHUN 2022**

**TANGGAL : 18 Mei 2022**

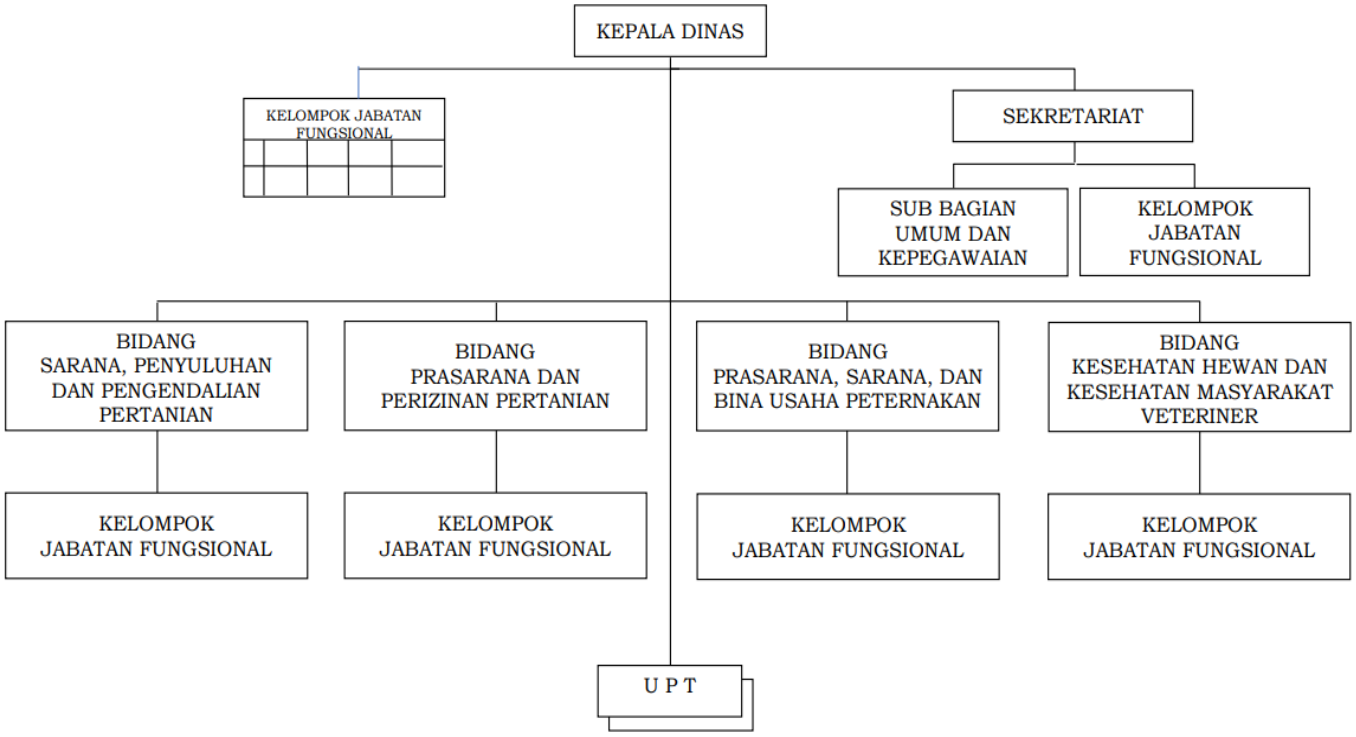


**Plt. BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

**b. Sumber Daya Dinas Pertanian**

Pelaksanaan fungsi Dinas Pertanian harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pertanian

**1. Kondisi Kepegawaian Dinas Pertanian**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pertanian sesuai struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) bidang dan 3 (tiga) UPT. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo sebanyak 232 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 Orang
2. Eslon III : 3 Orang
3. Eslon IV : 4 Orang
4. Jabatan fungsional : 58 Orang
5. Jabatan Pelaksana (PNS+P3K) : 111 Orang
6. Non PNS : 41 Orang
7. Tenaga Harian Lepas : 3 Orang (2 orang Kementerian Pertanian dan 1 orang Pemprov Jatim)
8. Tenaga Keamanan : 11 Orang (4 orang RPH , 1 orang dinas pertanian dan 2 UPT hortikultura Sumber, 1 UPT hortikultura lumbang dan 3 orang UPT Tanaman Pangan Paiton).

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertanian sebanyak 232 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 12
2. Sarjana S-1 : 137
3. Diploma -3 : 12
4. SLTA : 70
5. SLTP : 1
6. SD : 0

**2. Aset / modal**

Semua aset di Dinas Pertanian digunakan sebagai penunjang kinerja dimana aset ini berupa barang berwujud dan tidak berwujud. Sebagian besar nilai aset adalah aset tetap yang dalam hal ini adalah tanah, gedung/bangunan, jaringan jalan, dan jaringan irigasi. Selain aset tetap tersebut terdapat aset yang berupa sarana perkantoran, software, tanaman hidup (pohon), pompa air, handtraktor, dan peralatan alsintan lainnya.

Aset Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo terletak di semua kecamatan, seperti misalnya bangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Rumah Potong Hewan (RPH), UPT-UPT, dan lahan yang dikelola masyarakat.

Tabel 2.3. Lokasi aset Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo

| Jenis Aset | Jumlah | Lokasi |
|---|---|---|
| 1) Tanah, gedung Perkantoran dan Sarananya | 1 unit | Desa Pabean Kecamatan Dringu |
| 2) Tanah, gedung dan sarana Balai Penyuluhan Pertanian | 24 unit | 24 kecamatan |
| 3) Tanah (termasuk sawah). gedung, bangunan dan sarana UPT Produksi Benih Tanaman Pangan | 1 unit | Desa Sidodadi, Desa Asembakor, Desa Sumberlele |
| 4) Tanah (termasuk lahan pertanian) , gedung, bangunan dan sarana UPT Produksi Benih Hortikultura | 1 unit | Desa Cepoko dan Desa Lambangkuning |
| 5) Tanah, gedung UPT Puskeswan dan Puskeswan 6 Kecamatan | 7 unit | Kec. Dringu, Wonomerto, Banyuanyar, Maron, Bantaran, |

| | | |
|---|---|---|
| | | Pakuniran dan Krucil |
| 6) Rumah Potong Hewan (RPH) | 6 unit | Kec. Leces, Banyuanyar, Maron, Besuk, Gading dan Krejengan |
| 7) Tanah dan gedung UPT Pengawasan dan Sertfikasi Pangan | 1 unit | Desa Sumberlele jadi satu dengan BPP Kraksaan |
| 8) Gudang Pangan | 1 unit | Desa Sidodadi jadi satu dengan BPP Paiton |

**Tabel 2.4. Daftar dan nilai aset yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Per Tahun 2025**

| ASET TERCATAT | | | |
|---|---|---|---|
| **Tanah** | | | **Rp9.194.140.493,01** |
| TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN | 3 | Bidang | Rp1.177.457.600,00 |
| TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA | 11 | Bidang | Rp1.122.368.750,67 |
| TANAH BASAH | 4 | Bidang | Rp83.419.810,00 |
| TANAH PERKEBUNAN | 3 | Bidang | Rp1.371.671.525,00 |
| TANAH PERTANIAN | 18 | Bidang | Rp4.641.512.933,67 |
| TANAH KAMPUNG | 4 | Bidang | Rp797.709.873,67 |
| | | | |
| **Peralatan dan Mesin** | | | **Rp23.974.704.038,84** |
| ALAT BESAR DARAT | 6 | Unit | Rp153.000.000,00 |
| ALAT BANTU | 15 | Unit | Rp158.452.800,00 |
| ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR | 156 | Unit | Rp5.221.119.507,00 |
| ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR | 9 | Unit | Rp65.987.900,00 |
| ALAT BENGKEL BERMESIN | 7 | Unit | Rp27.400.000,00 |
| ALAT BENGKEL TAK BERMESIN | 26 | Unit | Rp54.350.000,00 |
| ALAT UKUR | 71 | Unit | Rp240.201.800,00 |
| ALAT PENGOLAHAN | 791 | Unit | Rp5.856.254.944,00 |
| ALAT KANTOR | 393 | Unit | Rp1.728.805.175,00 |
| ALAT RUMAH TANGGA | 1217 | Unit | Rp2.945.660.463,98 |
| MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT | 1129 | Unit | Rp792.611.000,83 |
| ALAT STUDIO | 112 | Unit | Rp526.314.052,00 |
| ALAT KOMUNIKASI | 32 | Unit | Rp113.100.000,00 |
| PERALATAN PEMANCAR | 29 | Unit | Rp103.270.000,00 |
| ALAT KEDOKTERAN | 103 | Unit | Rp1.067.784.000,00 |
| UNIT ALAT LABORATORIUM | 209 | Unit | Rp1.192.303.520,03 |
| ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH | 12 | Unit | Rp129.540.016,00 |
| ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP | 23 | Unit | Rp267.520.000,00 |
| KOMPUTER UNIT | 231 | Unit | Rp2.332.602.291,00 |
| PERALATAN KOMPUTER | 286 | Unit | Rp662.606.449,00 |
| ALAT SAR | 24 | Unit | Rp82.398.120,00 |
| ALAT KERJA PENERBANGAN | 30 | Unit | Rp221.742.000,00 |
| RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT | 44 | Unit | Rp31.680.000,00 |
| | | | |
| **Gedung dan Bangunan** | | | **Rp38.810.495.693,11** |
| Bangunan Gedung | 41 | Bangunan | Rp38.810.495.693,11 |
| | | | |
| **Jalan, Jaringan dan Irigasi** | | | **Rp8.170.906.245,23** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JALAN | 17 | Unit | Rp3.174.870.045,23 |
| JEMBATAN | 1 | Unit | Rp5.200.000,00 |
| BANGUNAN AIR IRIGASI | 76 | Unit | Rp4.137.989.200,00 |
| BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT | 1 | Unit | Rp222.750.000,00 |
| BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU | 2 | Unit | Rp72.647.000,00 |
| INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU | 76 | Unit | Rp59.075.000,00 |
| INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH | 1 | Unit | Rp351.500.000,00 |
| INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK | 3 | Unit | Rp38.375.000,00 |
| INSTALASI GARDU LISTRIK | 7 | Unit | Rp9.750.000,00 |
| JARINGAN AIR MINUM | 3 | Unit | Rp95.750.000,00 |
| JARINGAN TELEPON | 1 | Unit | Rp3.000.000,00 |
| | | | |

Selain aset tetap terdapat aset yang berupa barang bergerak seperti kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor roda 2, dan kendaraan roda 3), laptop, hand traktor, dan lainnya.

Selain aset yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo juga terdapat aset yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian RI dan Provinsi Jawa Timur yang dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, seperti misalnya sepeda motor yang banyak dipakai oleh para PPL dan Petugas Teknis Peternakan.

a. Unit usaha yang masih operasional.

Unit usaha Dinas Pertanian terdapat 2 jenis, yaitu UPT dan aset yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan UPT yang menjadi Unit usaha saat ini adalah UPT Produksi Benih Tanaman Pangan dan UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura. Untuk non UPT berupa penyewaan peralatan alat mesin pertanian, lahan pertanian dan Gudang Pangan sebagai cadangan pangan pemerintah daerah.

**UPT Produksi benih Tanaman Pangan**

UPT ini berpusat kegiatan di desa Sidodasi Kecamatan Paiton. Lokasi lahan berada di **Desa Sidodadi** Kecamatan

Kraksaan, **desa Asembakor** dan **Desa Sumberlele** Kecamatan Kraksaan. Sedangkan proses kegiatan berupa budidaya benih padi, pasca panen benih, dan pengolahan menjadi benih padi berlabel. Untuk saat ini prasarana dan sarana di UPT Produksi Benih Tanaman Pangan cukup lengkap dalam menunjang proses produksi, namun untuk pengembangan terkendala dengan keterbatasan lahan, sehingga diperlukan upaya perluasan lahan pertanian untuk pengembangannya.

Tabel 2.6. Profil UPT Produksi Benih Tanaman Pangan (1 unit)

| **PROFIL UMUM** | | |
|---|---|---|
| *Tahun pembangunan awal* | Tahun 2006 | |
| *Jenis barang/jasa Utama yang dihasilkan* | Benih padi unggul berlabel; pada musim kering berupa tanaman tembakau | |
| *Kapasitas Produksi* | 12,2 ton | |
| *Produksi maksimal yang pernah dicapai* | 12,2 ton | |
| *Luas lahan* | 7 Hektar | |
| *Jenih pelayanan* | Pengeringan, budidaya benih padi, gudang | |
| *Pendapatan Asli daerah* | 214.600.000 (target perubahan 2025) | |
| *Waktu operasional* | Senin s/d Jumat | |
| PRASARANA | | |
| *Lahan / sawah* | 4 ha | Di Paiton dan Kraksaan |
| *Gudang* | 5 unit | Di Paiton, kapasitas 50 ton |
| *Lantai Jemur* | 3 unit | Di Paiton, luas 2.754 $m^2$ |
| *Gedung Kantor* | 1 unit | Di Paiton |
| *Rumah Dinas* | 1 unit | Di Paiton |
| *Pagar* | 1 unit | Di Paiton |
| SARANA IRIGASI | | |
| *Sumber Air / sumur bor* | 3 Titik | Masih kurang 2 Titik lagi |
| *Selang/Terpal lipat* | 100 m | Masih kurang 300 mlagi |
| *Saluran irigasi* | 400 m | Masih kurang 200 m dan kondisi saluran masih belum diplengseng. |
| SARANA TRANSPORTASI | | |
| *Sepeda motor roda 2* | 2 Unit | |
| *Sepeda motor roda 3* | 3 Unit | |
| *Mobil Pick Up* | 1 Unit | |
| SARANA PROSSESING | | |
| *Separator* | 1 unit | |
| *Blower* | 1 unit | |
| *Mesin Jahit* | 1 unit | |
| *Timbangan* | 1 unit | |

| | |
|---|---|
| *Pengukur kadar air* | 1 unit |

**UPT Produksi Benih Hortikultura**

UPT Produksi Benih Hortikultura terletak di 2 lokasi yaitu Desa Cepoko Kecamatan Sumber dan Desa Lambang Kuning Kecamatan Lumbang. Untuk Unit di Desa **Cepoko** dikhususkan untuk produksi benih **tanaman kentang** dengan diselingi tanaman kubis atau tanaman lain, hingga saat ini sudah menghasilkan produksi dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk unit di Desa **Lambang Kuning** digunakan untuk produksi benih tanaman **buah-buahan** atau tanaman hortikultura lainnya namun untuk saat ini masih belum berproduksi.

Tabel 2.7. Profil UPT Produksi Tanaman Hortikultura

| Prasarana UP Kentang | | |
|---|---|---|
| Tahun pembangunan awal | 2006 | |
| Jenis barang/jasa Utama yang dihasilkan | Benih kentang Go,G1, G2 | |
| Kapasitas Produksi | | |
| Produksi maksimal yang pernah dicapai | | |
| Luas lahan | 6 Ha | |
| Jenis Pelayanan | Penyediaan Benih bersertifikat | |
| JARINGAN IRIGASI / Pipanisasi | | |
| Paralon 2 dim | 750 Buah | |
| SARANA TRANSPORTASI | | |
| Roda 4 | 1 unit | |
| Roda 3 | 2 unit | |
| Roda 2 | 5 unit | |
| BANGUNAN | | |
| Kantor | 1 unit | 80 $m^2$ |
| JUT | 1 unit | 360 m |
| Pagar | 1 unit | 1000 $m^2$ |
| Gudang | 1 unit | 80 $m^2$ |
| Rumah Dinas | 1 unit | 40 $m^2$ |
| Steamer / alat sterilisasi media tanam | 1 unit | 9 $m^2$ |

Sumber: UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura

Tabel 2.8. Perbandingan kebutuhan dan keberadaan sarana di UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura

| No | Jenis Bahan dan Peralatan | Kebutuhan | Keberadaan | Kekurangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultivator | 2 Unit | - | 2 Unit |
| 2 | Pompa Air (jet Pump) | 10 Unit | 2 Unit | 8 Unit |
| 3 | Cangkul | 30 Buah | - | 30 Buah |
| 4 | Sprinkle (kabut) | 4 Unit | - | 4 Unit |
| 5 | Tandon | 7 Unit | - | 7 Unit |
| 6 | Screen Net | 3 Ha | - | 3 Ha |
| 7 | Areal Lahan Budidaya | 10 Ha | 5 Ha | 5 Ha |
| 8 | Power Sprayer | 4 Unit | 1 Unit (rusak) | 4 Unit |
| 9 | Selang Sanchine | 8 Roll | 2 Roll (rusak) | 8 Roll |
| 10 | Selang 3/4 dop | 10 Roll | - | 10 Roll |
| 11 | Jalan Usaha Tani | 1 Km | - | 1 Km |
| 12 | Krat Benih | 500 Buah | 100 Buah | 400 Buah |
| 13 | Screen House | 4 unit | 2 Unit | 2 Unit |
| 14 | Cold Storage | 2 Unit | - | 2 Unit |
| 15 | Lab. Kultur Jaringan | 1 Paket | - | 1 Paket |

Sumber: UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura

Tabel 2.9. Perkembangan Pembiayaan Unit Pembenihan Kentang Desa Cepoko Kecamatan Sumber Tahun 2018-2024

| **Periode** | **Biaya Operasional** *(Rp)* | **Pendapatan (PAD)** *(Rp)* | **Produksi benih** *(kg)* | **Keterangan** |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 370.000.000 | 411.950.000 | | Produksi stek, G0, G2 |
| 2019 | 1.598.000.000 | 603.000.000 | | Produksi stek, G0, G2 |
| 2020 | 672.768.600 | 575.247.500 | | Produksi stek, G0, G2 |
| 2021 | | 501.579.600 | | |
| 2022 | 515.000.000 | | | |
| 2023 | 624.000.000 | | | |
| 2024 | 0 | 0 | | |

Sumber : *Dinas Pertanian (2025)*

Tabel 2.10. Kondisi Unit pembenihan Hortikultura (1 unit)

| | |
|---|---|
| Tahun pembangunan awal | 2014 |
| Alamat | Desa Lumbangkuning kecamatan Lumbang |
| Jenis barang/jasa utama yang dihasilkan | Benih buah unggulan lokal (alpokat, mangga) |
| Kapasitas Produksi | --- |
| Jenis Pelayanan | Penjualan benih tanaman hortikultura unggulan (buah-buahan) berlabel |

Sarana dan Prasarana Alat Pembenihan Buah/ Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, dengan lokasi di Kecamatan Lumbang Desa Lambang kuning terdiri dari :

1) Luas lahan 20.000 Ha
2) Bangunan seluas 150 $m^2$
3) Sarana Kantor : kursi, meja, almari.
4) Pagar 1.000 m
5) Sumur dalam 1 unit
6) Bak penampung air
7) Screen house
8) Rak pembenihan
9) Pohon induk tanaman buah
    i. Alpokat = 100 pohon
    ii. Manggis= 10 pohon
    iii. Mangga = 20 pohon
10) Pompa air
11) Cangkul

Tabel 2.11. Sarana dan prasarana kerja di lingkungan subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

| No | Nama aset | Alamat | Jumlah | Keterangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Baik | Kurang Baik | **Rusak Berat** |
| 1 | Bangunan Kantor Disnak | Jl.Raya Dringu KM.VI | 1 lokasi | √ | | |
| 2 | Bangunan UPTD IB | Jl.Raya Dringu No.80 | 1 lokasi | √ | | |
| 3 | RPH | Leces | 1 lokasi | √ | | |
| 4 | RPH | Banyuanyar | 1 lokasi | √ | | |
| 5 | RPH | Maron | 1 lokasi | √ | | |
| 6 | RPH | Besuk | 1 lokasi | | √ | |
| 7 | RPH | Gading | 1 lokasi | | √ | |
| 8 | RPH | Kotaanyar | 1 lokasi | | | √ |
| 9 | RPH | Krejengan | 1 lokasi | √ | | |
| 10 | Puskeswan | Bantaran | 1 lokasi | √ | | |
| 11 | Puskeswan | Wonomerto | 1 lokasi | √ | | |
| 12 | Puskeswan | Krucil | 1 lokasi | √ | | |
| 13 | Puskeswan | Banyuanyar | 1 lokasi | √ | | |
| 14 | Lab. Type C | Dringu | 1 lokasi | √ | | |
| 15 | Pos IB | Pakuniran | 1 lokasi | √ | | |
| 16 | Pos IB | Maron | 1 lokasi | √ | | |
| | Kendaraan | | | | | |
| 17 | Roda 4 | Jl.Raya Dringu KM.VI | 6 unit | 3 | 1 | **2** |
| 18 | Roda 2 | Jl.Raya Dringu KM.VI | 19 Unit | 12 | 4 | **3** |
| 19 | Roda 3 | Jl.Raya Dringu KM.VI | 4 Unit | 4 | | |

3. **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja PD, maka Dinas Pertanian telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## c. Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

| Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian Renstra | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Urusan Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Peningkatan Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan* | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ** | ** | 2,04 | 2,25 | 3,14 | | | 101,85 | 112,31 | 104,54 |
| *Peningkatan Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura* | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ** | ** | 1,83 | 1,94 | 2,72 | | | 91,74 | 96,85 | 90,67 |
| *Peningkatan Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan* | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ** | ** | 2,24 | 2,89 | 2,92 | | | 112,08 | 144,67 | 97,43 |
| **Sub Urusan Peternakan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Peningkatan Produksi dan Populasi Sub Sektor Peternakan* | | | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1,24 | 1,02 | 1,29 | - | - | 124 | 101,79 | 129 |
| *Peningkatan Populasi Peternakan* | | | 1 | 1 | - | - | - | 1,4 | 1,22 | - | - | - | 141,82 | 122,45 | - | - | - |
| *Peningkatan Produksi Peternakan* | | | 1 | 1 | - | - | - | 4,12 | 1,19 | - | - | - | 410,85 | 119,41 | - | - | - |

** Indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pada tahun 2022 terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah, dimana Dinas Peternakan digabung ke dalam Dinas Pertanian. Penggabungan ini membawa konsekuensi pada penyesuaian indikator kinerja, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaporan hasil capaian Renstra. Sebelum tahun 2022, indikator sub urusan peternakan dilaporkan secara terpisah, mencakup peningkatan populasi dan peningkatan produksi peternakan.

Data capaian menunjukkan bahwa kinerja peternakan sebelum penggabungan cukup tinggi. Pada tahun 2020, peningkatan populasi peternakan mencapai 141,82% dari target, sedangkan peningkatan produksi bahkan melonjak hingga 410,85%. Tahun 2021, capaian masih berada di atas target dengan realisasi 122,45% untuk populasi dan 119,41% untuk produksi. Angka-angka ini menggambarkan bahwa sektor peternakan berkontribusi signifikan sebelum dilebur ke dalam struktur Dinas Pertanian.

Sejak tahun 2022, indikator peternakan tidak lagi ditampilkan sebagai capaian tersendiri, melainkan menjadi bagian dari indikator pertanian secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari data capaian subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Tanaman pangan menunjukkan tren positif dengan capaian di atas target, yaitu 101,85% pada tahun 2022, meningkat menjadi 112,31% di tahun 2023, dan tetap terjaga pada 104,54% di tahun 2024.

Berbeda dengan tanaman pangan, subsektor hortikultura justru masih menghadapi tantangan. Capaian kinerja hortikultura berada di bawah target pada tiga tahun berturut-turut, yakni 91,74% pada tahun 2022, 96,85% pada tahun 2023, dan kembali menurun ke 90,67% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan program hortikultura agar mampu mendukung capaian kinerja pertanian secara keseluruhan.

Sementara itu, subsektor perkebunan memperlihatkan capaian yang sangat baik pada awal integrasi, yaitu 112,08% pada tahun 2022 dan bahkan melonjak hingga 144,67% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 capaian tersebut menurun dan hanya mencapai 97,43%, mendekati target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, penggabungan Dinas Peternakan ke dalam Dinas Pertanian sejak 2022 memberikan dua konsekuensi utama. Pertama, dari sisi administrasi, indikator peternakan tidak lagi dilaporkan secara terpisah tetapi menyatu dalam kinerja pertanian. Kedua, dari sisi capaian kinerja, subsektor tanaman pangan dan perkebunan relatif konsisten melampaui target, sedangkan subsektor hortikultura masih perlu mendapat perhatian serius karena belum mampu mencapai target selama tiga tahun terakhir.

## Target dan Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan 2020-2024

| No | Komoditas | Target Tahun (Ton) | | | | | Realisasi Tahun (Ton) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Padi | | 276.415,72 | 277.643,11 | 319.456,00 | 305.046,50 | 2.709.958,46 | 272.199,13 | 272.199,13 | 296.161,67 | 285.528,33 |
| 2 | Jagung | | 196.316,03 | 200.198,23 | 215.979,00 | 269.465,60 | 1.924.667,00 | 196.272,77 | 210.349,25 | 261.617,09 | 315.067,68 |
| 3 | Kedelai | | 255,51 | 138,29 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 | 135,58 | 99,53 | 114,33 | 0,00 |
| 4 | Kacang Tanah | | 1.073,55 | 1.341,30 | 0,00 | 0,00 | 10.525,00 | 1.315,00 | 1.203,26 | 440,39 | 0,00 |
| 5 | Ubi Kayu | | 23.295,07 | 158,28 | 0,00 | 0,00 | 228.383,00 | 155,18 | 26.490,07 | 30.217,24 | 0,00 |
| 6 | Ubi Jalar | | 0,00 | 27.820,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.274,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kacang Hijau | | 370,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.634,80 | 0,00 | 99,26 | 106,25 | 0,00 |
| 8 | Sorghum | | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |

## Target dan Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura 2020-2024

| No | Komoditas | Target Tahun (Kwintal) | | | | | Realisasi Tahun (Kwintal) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Bawang Daun | | 257.649,96 | 239.842,80 | 238.834 | 435.474 | 252.598 | 235.140 | 313.200 | 422.790 | 329.560 |
| 2 | Bawang Merah | | 862.310,04 | 692.683,02 | 618.943 | 750.457 | 845.402 | 679.101 | 372.308 | 728.599 | 652.124 |
| 3 | Bawang Putih | | 5.793,60 | 1.356,60 | 1.359 | 6.232 | 5.680 | 1.330 | 8.000 | 6.050 | 0 |
| 4 | Kembang Kol | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 5 | Kentang | | 617.844,60 | 537.948,00 | 278.959 | 392.018 | 605.730 | 527.400 | 439.650 | 380.600 | 365.992 |
| 6 | Kubis | | 400.360,20 | 591.651,00 | 262.734 | 395.263 | 392.510 | 580.050 | 330.220 | 383.750 | 394.090 |
| 7 | Petsai/Sawi | | 7.744,86 | 800,70 | 12.680 | 9.668 | 7.593 | 785 | 796 | 9.386 | 847 |
| 8 | Wortel | | 81.162,42 | 94.212,30 | 34.890 | 157.157 | 79.571 | 92.365 | 95.480 | 152.580 | 107.940 |
| 9 | Bayam | | 4,08 | 0,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 0 |
| 10 | Buncis | | 2.784,60 | 1.948,20 | 4.802 | 3.245 | 2.730 | 1.910 | 1.590 | 3.175 | 5.215 |
| 11 | Cabai Besar | | 52.372,92 | 35.245,08 | 14.255 | 80.263 | 51.346 | 34.554 | 104.800 | 77.925 | 27.854 |
| 12 | Cabe Keriting | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.632 | 0 |
| 13 | Cabe Rawit | | 373.002,78 | 314.685,30 | 117.257 | 167.954 | 365.689 | 308.515 | 273.626 | 164.469 | 307.808 |
| 14 | Jamur Tiram | | 40,80 | 23.983,26 | 13.608 | 0 | 40 | 23.513 | 0 | 11 | 0 |
| 15 | Jamur Merang | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 |
| 16 | Jamur Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 |
| 17 | Kacang Panjang | | 63,24 | 0,00 | 170 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Kangkung | | 6,12 | 0,00 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| 19 | Mentimun | | 10,20 | 1,02 | 121 | 0 | 10 | 1 | 0 | - | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Labu Siam | | 39.039,48 | 24.096,48 | 74.252 | 4.285 | 38.274 | 23.624 | 5.760 | 4.160 | 3.740 |
| 21 | Paprika | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 22 | Terung | | 926,16 | 34,68 | 456 | 0 | 908 | 34 | 3.420 | 2.959 | 0 |
| 23 | Tomat | | 51.637,50 | 57.925,80 | 5.881 | 101.740 | 50.625 | 56.790 | 51.395 | 8.777 | 58.958 |
| 24 | Melon | | 2.238,90 | 336,60 | 6.072 | 46 | 2.195 | 330 | 2.628 | 45 | 4.160 |
| 25 | Semangka | | 5.780,34 | 4.571,64 | 11.064 | 1.439 | 5.667 | 4.482 | 13.217 | 1.397 | 12.194 |
| 26 | Stroberi | | 12,24 | 112,20 | 152 | 0 | 12 | 110 | 0 | 8 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |

**Target dan Produksi Sub Sektor Perkebunan 2020-2024**

| No | Komoditas | Target Tahun (Kwintal) | | | | | Realisasi Tahun (Kwintal) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Tembakau paiton Vo | | 17.751,06 | 12.144,12 | 11.505,36 | 16.837 | 17.403 | 11.906 | 2.981 | 16.376,00 | 14.789 |
| 2 | Tembakau kasturi | | 26,52 | 8,16 | 142,00 | 53 | 26 | 8 | 5.500 | 51,70 | 88 |
| 3 | Tembakau jawa | | 2.667,30 | 500,82 | 549,00 | 601 | 2.615 | 491 | 114 | 583,02 | 596 |
| 4 | Tebu | | 39.154,74 | 987.649,68 | 151.141,00 | 181.575 | 38.387 | 968.284 | 457.207 | 200.345,88 | 179.512 |
| 5 | Kelapa | | 2.043,06 | 2.005,32 | 2.360,69 | 0,00 | 2.003 | 1.966 | 2.117 | 1.596,25 | 1.484,87 |
| 6 | Kopi Arabika | | 543,66 | 686,46 | 786,70 | 573 | 533 | 673 | 614 | 556,68 | 505,30 |
| 7 | Kopi Robusta | | 2.589,78 | 4.197,30 | 8.529,74 | 3.948 | 2.539 | 4.115 | 4.115 | 3.832,28 | 5.139,90 |
| 8 | Jarak Pagar | | 43,86 | 64,26 | 42,00 | 0,00 | 43 | 63 | 63 | 0 | 0 |
| 9 | Kapuk Randu | | 233,58 | 482,46 | 267,00 | 178 | 229 | 473 | 473 | 173,30 | 43,75 |
| 10 | Cengkeh | | 134,64 | 128,52 | 178,00 | 185 | 132 | 126 | 126 | 179,27 | 171,60 |
| 11 | Kakao | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 12 | Kenanga | | 4,08 | 15,30 | 16,44 | 3 | 4 | 15 | 15 | 3,07 | 0,96 |
| 13 | Pinang | | 410,04 | 433,50 | 86,24 | 71 | 402 | 425 | 369 | 69,09 | 74,68 |
| 14 | Kayu Manis | | 10,20 | 10,20 | 1,20 | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4,80 |
| 15 | Asam Jawa | | 2.772,36 | 1.191,36 | 0,00 | 9 | 2.718 | 1.168 | 1.160 | 8,78 | 13,20 |
| 16 | Karet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 17 | Sereh Wangi | | 391,68 | 80,58 | 15,00 | 124 | 384 | 79 | 930 | 120 | 256,00 |
| 18 | Jambu Mete | | 5,10 | 18,36 | 0,00 | 1 | 5 | 18 | 5 | 1,07 | 0 |
| 19 | Lada | | 19,89 | 12,24 | 0,00 | 9 | 19,5 | 12 | 12 | 8,89 | 14,70 |
| | | | | | | | | | | | |

## Target, Populasi dan Produksi Sub Sektor Peternakan 2020-2024

| No. | Indikator | Target NSPK | IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Populasi Ternak | | | 1. Sapi Potong | 277,306 | 280.079 | 282.879 | 241.282 | 182.471 | 312,983 | 319.388 | 238.893 | 180.664 | 202.092 | 112.87 | 114,03 | 84,45 | 74,88 | 110,75 |
| | | | | 2. Sapi Perah | 5,857 | 5.916 | 5.975 | 7.458 | 14.381 | 6,249 | 8.024 | 7.384 | 14.239 | 12.686 | 106.69 | 135,63 | 123,58 | 190,92 | 88,21 |
| | | | | 3. Kambing | 66,866 | 67.535 | 68.210 | 48.261 | 89.608 | 59,858 | 51.499 | 47.783 | 88.721 | 77.566 | 89.52 | 76,25 | 70,05 | 183,84 | 86,56 |
| | | | | 4. Domba | 82,629 | 83.455 | 84.290 | 67.658 | 65.245 | 69,894 | 73.535 | 66.988 | 64.599 | 129.826 | 84.59 | 88,11 | 79,47 | 95,48 | 198,98 |
| | | | | 5. Ayam Ras | 3.026.848 | 3.057.116 | 3.087.688 | 4.721.726 | 5.488.687 | 4,966,554 | 4.892.456 | 4.674.976 | 5.434.344 | 8.648.819 | 164.08 | 160,03 | 151,40 | 115,09 | 157,58 |
| | | | | 6. Ayam Buras | 602,563 | 608.589 | 614.674 | 685.726 | 443.181 | 633,929 | 629.689 | 678.937 | 438.793 | 610.000 | 105.21 | 103,46 | 110,45 | 63,99 | 137,64 |
| | | | | 7. Itik/Bebek | 168,728 | 170.415 | 172.119 | 100.801 | 173.115 | 96,767 | 95.395 | 99.803 | 171.401 | 109.581 | 57.35 | 55,97 | 57,98 | 170,04 | 63,30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Peningkatan Produksi Ternak | | | 1. Telur | 710,819 | 718.780 | 725.968 | 2.140.052 | 5.034.459 | 2,743,329 | 2.145.606 | 2.118.863 | 4.984.613 | 2.708.822 | 385.94 | 298,5 | 295,55 | 232,92 | 53,81 |
| | | | | 2. Susu | 2,880,773 | 2.909.580 | 2.938.676 | 13.128.098 | 11.239.051 | 10,902,889 | 12.413.330 | 12.998.117 | 11.127.773 | 13.763.962 | 378.47 | 426,63 | 442,31 | 84,76 | 122,47 |
| | | | | 3. Daging | 541,866 | 547.293 | 552.765 | 2.797.890 | 3.092.459 | 3,126,163 | 3.878.076 | 2.770.190 | 3.061.841 | 3.082.108 | 576.93 | 708,59 | 501,15 | 109,43 | 99,67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kinerja Urusan Pertanian kurun waktu 2020-2024 lebih ditekankan kepada pencapaian peningkatan produksi tanaman pertanian. Produksi pertanian cenderung stagnan dan mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Selama kurun waktu 2020-2024 banyak yang terjadi dengan tingkat produksi tanaman pertanian, dimana faktor iklim yang tidak menentu menjadi tingkat produksi tanaman pertanian mengalami pasang-surut serta terjadinya pandemi Covid 19 yang mempengaruhi kinerja sektor pertanian. Selain itu adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) tahun 2022 menyebabkan populasi ternak ruminansia mengalami penurunan yang cukup signifikan dan berdampak pula pada produksi daging sebagai akibat dari ketakutan masyarakat mengkonsumsi daging ternak ruminansia (sapi, kambing dan domba).

Selama tahun 2020-2024 Kinerja sektor pertanian semakin sulit diperkirakan karena semakin banyak faktor ekternal yang mempengaruhinya. Produksi padi Kabupaten Probolinggo merupakan 0,3 % dari produksi nasional dan produksi jagung Probolinggo merupakan 0,91% dari produksi jagung nasional, sedangkan untuk bawang merah adalah 3,2 %. Dari data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Probolinggo hanyalah merupakan **salah satu daerah** yang menopang keberadaan komoditas nasional yang menjadi perhatian pemerintah. Selama beberapa tahun terakhir pemerintah telah menetapkan target peningkatan produksi tanaman pertanian yang tinggi, dimana dalam penentuan target disertai dengan bantuan sarana dan teknologi pertanian yang cukup massif.

## d. Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan tahun 2020-2024

| No | Program | Pagu (dalam juta) | | | | | Realisasi (dalam juta) | | | | | Persentase | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Peningkatan Produksi Perkebunan | 802 | 76 | - | - | - | 791 | 69 | - | - | - | 99 | 92 | - | - | - |
| 2 | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Komoditi Pertanian | 3.641 | 1.380 | - | - | - | 3.517 | 1.345 | - | - | - | 97 | 97 | - | - | - |
| 3 | Peningkatan Kualitas Bahan Baku | 2.490 | 1.297 | - | - | - | 2.334 | 1.282 | - | - | - | 94 | 99 | - | - | - |
| 4 | Peningkatan Kesejahteraan Petani | 554 | 51 | - | - | - | 553 | 50 | - | - | - | 99 | 97 | - | - | - |
| 5 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian | 8.902 | 2.134 | - | - | - | 8.798 | 1.934 | - | - | - | 99 | 91 | - | - | - |
| 6 | Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pertanian | 250 | 1.607 | - | - | - | 242 | 1.590 | - | - | - | 97 | 99 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | - | - | 8.583 | 8.434 | 12.486 | - | - | 7.312 | 7.484 | 5.246 | - | - | 85,20 | 88,73 | 42,02 |
| 8 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | - | - | 5.230 | 2.402 | 6.537 | - | - | 4.869 | 2.249 | 5.235 | - | - | 93,09 | 93,62 | 80,09 |
| 9 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | - | - | 7.636 | 408 | 1.193 | - | - | 5.827 | 379 | 943 | - | - | 76,31 | 92,92 | 79,02 |
| 10 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | - | - | 1.001 | 451 | 872 | - | - | 630 | 446 | 837 | - | - | 62,91 | 98,96 | 95,93 |
| 11 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | - | - | 120 | 70 | 37 | - | - | 75 | 67 | 35 | - | - | 62,74 | 96,17 | 97,21 |
| 12 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | - | - | 2.308 | 541 | 1.070 | - | - | 1.005 | 515 | 992 | - | - | 43,58 | 95,32 | 92,75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dalam pencapaian kinerja Urusan Pertanian mengalami permasalahan Penerapan Teknologi Pertanian, Di Kabupaten Probolinggo penerapan teknologi pertanian belum optimal sebagaimana penjelasan berikut ini :

1. **Teknologi alat mesin pertanian**,

   Pada tahun 2020-2024 cukup banyak bantuan alat mesin pertanian yang diberikan kepada kelompok tani dengan berbagai model, namun penggunaan masih sangat kurang/ belum optimal. Perubahan pola budidaya tanaman pertanian dalam kurun waktu 5 tahun, beberapa peralatan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman akan menurun jumlahnya bahkan menghilang. Beberapa peralatan yang meningkat jumlahnya secara signifikan adalah handtraktor, rice transplanter, dan combine harvester. Dalam perkembangan para **Operator** dari alat mesin pertanian ini terdapat kecenderungan menjadi kelembagaan tersendiri sebagai penyedia jasa pertanian/jasa sewa menyewa alsintan (wirausaha baru). Tahun 2013 terdapat UPJA sebanyak 77 unit sedangkan tahun 2018 terdapat 119 unit.

   Walaupun jumlah mesin pertanian yang canggih seperti Rice transplanter dan combine harvester meningkat secara signifikan namun dalam praktek pemanfaatannya masih sangat kurang. Hal ini karena terkendala sbb:

   - Ketidaksesuaian **spesifikasi mesin** dengan kondisi di lapangan.
   - Terjadinya **kerusakan sparepart** sehingga kelompok tani belum dapat menggantikannya
   - Masih adanya penolakan dari tenaga kerja tanam dan panen

- Belum tersedianya **jalan usaha tani** yang bisa digunakan untuk masuk ke sawah, sedangkan di lahan sekitarnya masih banyak petani yang belum waktunya panen.
- Sering terjadi **pencurian** alat dan mesin pertanian, misalnya mesin handtraktor, pompa air, jaring pengendali OPT, dan lainnya.

**2. Teknologi perbenihan.**

Teknologi perbenihan di Kabupaten Probolinggo telah ada namun masih belum semaju teknologi yang dimiliki oleh swasta. Secara umum Penggunaan benih bawang merah meningkat jumlahnya, namun produktivitas bawang merah mengalami penurunan, sehingga memerlukan jumlah **benih yang semakin lebih besar** dalam waktu 4 tahun terakhir dan naik di tahun 2023. Untuk komoditi kentang Selama kurun waktu 5 tahun terdapat perubahan penggunaan benih kentang G4 menjadi G1 dan G2. Sehingga sempat mengalami kesulitan dalam penyediaan benih.

3. **Teknologi pasca panen, penyimpanan, dan pengolahan hasil pertanian**. Teknologi ini telah ada di Kabupaten Probolinggo namun tidak berkembang padahal Teknologi ini sebenarnya bisa membantu peningkatan pendapatan para petani secara signifikan. Di Kabupaten Probolinggo semakin banyak yang melakukan sistem tebasan hasil panen pertanian, sehingga tidak memerlukan sarana pasca panen dan pengolahan.

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Pertanian dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Pertanian dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan
      1) Kabupaten Probolinggo merupakan daerah pertanian, dimana kondisi alamnya mendukung penyelenggaraan sektor pertanian. Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km, sedangkan sungai terpendek adalah Ranu Bujel dengan panjang 2 km. ungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Probolinggo sebagian besar digunakan irigasi disamping untuk industri, air minum dan mandi cuci. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun. Pada saat musim kemarau, sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih tergenang terus sepanjang tahun.

         Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m. Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar, sebagian untuk kebutuhan air minum

dan sebagian besar lainnya diperuntukkan **irigasi**, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami kekeringan. Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah< 60 m.

beberapa sungai pada waktu kemarau tidak bisa lagi memberikan air irigasi menyebabkan kelompok-kelompok tani berupaya untuk **menambah air irigasi** dengan menggunakan membangun *sumur irigasi air dangkal*, *menengah*, dan *dalam*. Pembangunan lebih banyak sebagai upaya untuk meningkatkan **Indeks Penanaman (IP).** Selain itu terhadap sungai-sungai kecil juga dibangunkan beberapa **dam parit**, sehingga dapat menaikkan air irigasi ke lahan-lahan pertanian. Pembangunan embung juga diupayakan dengan memanfaatkan sumber-sumber air agar tidak hilang begitu, diharapkan dengan penampungan air hujan atau mata air yang kecil-kecil bisa digunakan untuk mengairi lahan pertanian yang ada.

Sedangkan untuk pemanfaatan keberadaan ranu-ranu yang ada bisa digunakan **sistem pipanisasi**. Dengan cara menaikkan air ranu dengan menaikkan dan menyalurkan air ranu kepada lahan-lahan pertanian.

Sebagian Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayur sayuran seperti di sekitar pegunungan Tengger yang mempunyai ketinggian antara 750-2500 m di atas permukaan laut. Sedangkan tanah yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki pegunungan Argopuro dan berketinggian antara 150-750 m di atas permukaan laut sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti durian, alpukat dan buah-buahan lainnya.

Di Probolinggo selain musim kemarau dan penghujan tersebut terdapat musim pancaroba, di mana biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang biasa disebut **Angin Gending** yang mana ini memberikan dukungan bagi tanaman hortikultura (bawang merah, mangga).

Merujuk pada potensi pertanian dan peternakan Kabupaten Probolinggo yang termuat dalam KLHS RPJMD tahun 2025-2029 bahwa:

- Potensi kawasan perkebunan sebagian besar terdapat di wilayah bagian selatan untuk tanamana semusim (Tembakau, Tebu, Jarak, kapas, jahe) dan tanaman tahun (kelapa, kopi, aren, asem, cengkeh, lada, kapuk randu, jambu mente, pinang).
- Potensi kawasan pertanian tanaman pangan pada umumnya terdapat diwilayah utara (padi jagung,

kedelai, kacang tanah) dan tanaman hortikultura pada umumnya terdapat diwilayah selatan (kentang, kobis dan cabe, durian dan mangga).

- Potensi kawasan peternakan sebagian besar terdapat diwilayah selatan antara lain: ternak besar (sapi, kuda, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi) dan unggas (ayam ras, ayam kampung, itik, entok, kelinci).
- Merupakan daerah yang berpotensi untuk penyedia bibit, pengembangan wilayah bibit ternak sapi perah dan tersedianya hijauan makanan ternak (HMT) (di Kecamatan Krucil, Tiris, Sumber dan Lumbang),
- Terdapat pusat pengembangan pemasaran produk peternakan serta pengembangan sapi perah dan pasar agrobis sektor peternakan di Kecamatan Krucil dan Sukapura,
- Terdapat kawasan pembibitan ternak perdesaan (Village Breeding Centre) di Kecamatan Paiton, Kotaanyar, Krucil, Pajarakan, Gending, Wonomerto dan Tiris.

b. Kelemahan

1) Kepemilikan/**pengelolaan** lahan pertanian mayoritas dengan luasan kecil/gurem (>70%)
2) **Kelembagaan** petani masih belum mendukung kinerja petani secara optimal
3) **Belum ada kesiapan yang memadai** menghadapi kecepatan perubahan akibat mudahnya **akses informasi dan mobilitas komoditas** antar daerah
4) **Ketergantungan terhadap air hujan** dalam budidaya masih sangat tinggi bagi mayoritas petani, sehingga pilihan dan penerapan program menjadi terbatas.
5) Kualitas **Sumber Daya Manusia** masih rendah. Tentunya hal tersebut menjadikan sektor pertanian menjadi tidak efisien. Persoalannya adalah banyak tenaga kerja dibidang pertanian adalah **penduduk yang idle** (*tidak terlatih*), hanya terdapat **23%** tenaga kerja yang ada merupakan tenaga kerja yang terlatih. Hanya bidang pertanianlah yang dapat menampung **77 %** penduduk yang idle ini. Akibatnya kinerja bidang pertanian di Kabupaten Probolinggo tidak begitu memuaskan karena harus menanggung beban yang begitu besar.
6) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) utamanya terkait tuntutan kualitas dalam manajemen pengelolaan peternakan;
7) Masih terbatasnya wawasan dari masyarakat peternak dalam hal manajemen dan metode pengelolaan ternak yang baik dan benar;
8) Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai masih terbatas;

9) Keterbatasan ketersediaan bibit ternak berkualitas;
10) Cara Pemeliharaan ternak masih secara tradisional/semi intensif.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

1) Permintaan komoditi pertanian **cenderung naik**, dan tingkat harga komoditi akan lebih tinggi lagi
2) Pembangunan di desa yang fokus sektor pertanian mendapatkan dana yang cukup besar.
3) **Sistem informasi** sudah dapat diakses dimana saja dengan mudah sehingga memudahkan semua pihak dalam berinteraksi
4) Dinamika/perkembangan yang sangat pesat terkait teknologi pengolahan pangan, termasuk di dalamnya produk-produk asal hewan;
5) Perlunya segera disusun perangkat lunak kebijakan mulai dari pusat sampai dengan daerah (permentan/perda/perbup) terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Tantangan

1) Produksi, produktivitas, dan mutu komoditas pertanian **cenderung stagnan;**
2) **Perundang-undangan** tentang pertanian belum diterapkan secara optimal;
3) **Penerapan alat mesin pertanian** belum optimal,beberapa tahun yang lampau sudah ada alat mesin yang dibantukan oleh pemerintah namun sebagian penggunaan belum optimal (malahan mangkrak) karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

4) Prasarana dan Sarana **semakin terbatas** bagi peningkatan produksi.Utamanya masalah air dimana sektor lainnya juga meningkat kebutuhannya, kualitas lahan pertanian mengalami penurunan (walaupun penggunaan pupuk organik sudah diterapkan kepada para petani namun kandungan tanah juga diperlukan dan perlu ada informasi yang lebih detail dan akurat lagi bagi petani).
5) **Kondisi iklim / alam** yang sulit untuk diprediksi
6) Belum **ada logistik yang mendukung hasil pertanian** yang sepadan untuk mengatasi dampak jalan tol
7) **Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian**, walaupun sudah sudah ada arahan luas untuk PLP2B namun ancaman penurunan jumlah produksi akan terus terjadi karena ada lahan-lahan di luar PLP2B yang akan dikonversi menjadi lahan non pertanian.
8) Munculnya wabah penyakit hewan menular (stereotip/zoonosis) akibat kurang tertibnya peredaran lalu lintas ternak;
9) Perkembangan dunia agroindustri/agribisnis, diikuti ketatnya persaingan dalam era pasar bebas;
10) Munculnya wabah penyakit hewan menular (stereotip/zoonosis) akibat kurang tertibnya peredaran lalu lintas ternak;
11) Dinamika/ perkembangan yang sangat pesat terkait teknologi pengolahan pangan, termasuk di dalamnya produk-produk asal hewan;
12) Perkembangan dunia agroindustri /agribisnis, diikuti ketatnya persaingan dalam era pasar bebas;

13) Perlunya segera disusun perangkat lunak kebijakan mulai dari pusat sampai dengan daerah (permentan/perda/perbup) terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian

### a. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

Dinas Pertanian memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja PD, maka Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Pertanian. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan dibidang pertanian, pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian, pelaksanaan administrasi, pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian**

| No. | Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan produksi semakin sulit | Produktivitas semakin sulit mengalami kenaikan | • SDM perangkat dan petani belum optimal<br>• Pengendalian OPT belum optimal<br>• Kualitas tanah semakin turun<br>• Ketersediaan air semakin terbatas<br>• Ketersediaan prasarana dan sarana belum optimal<br>• Kelembagaan petani belum optimal<br>• Anomali iklim<br>• Peternak semakin berkurang<br>• Penyakit Hewan ternak<br>• Dampak lingkungan |
| | | Luas lahan semakin berkurang | • Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian<br>• Berkurangnya ketersediaan air<br>• Ketersediaan air irigasi semakin terbatas<br>• Alih mata pencaharian pertanian/peternakan ke non pertanian/peternakan |
| 2 | Harga komoditas | Kepastian pasar yang setiap saat bisa berubah | • Musim panen yang bersamaan akibat pola panen belum optimal<br>• Mutu produksi yang rendah<br>• Pasca panen yang belum optimal<br>• Kemitraan petani belum optimal<br>• Kelembagaan petani belum bisa menyokong agribisnis petani<br>• Akses informasi pasar belum optimal<br>• Monopoli industry<br>• Keterbatasan pembiayaan |

## Permasalahan Urusan Pertanian

Berkaitan dengan nilai tambah pada subsektor bahan pangan, hortikultikultura, dan perkebunan mempunyai kecenderungan pada tahun-tahun terakhir sektor Pertanian *semakin sulit jika masih menggunakan cara konvensional. Padahal nilai tambah ini merupkan salah satu pendorong* untuk meningkatkan laju pertumbuhan bidang pertanian. Indikator Produksi tanaman pertanian ini juga terkait secara langsung pendapatan para petani. Baik produksi tanaman pertanian

maupun pendapatan petani saling mempengaruhi secara langsung. Namun peningkatan produksi tidak selalu meningkatkan pendapatan petani, selama beberapa tahun terakhir ini semakin banyak faktor yang berpengaruh seperti *kebijakan impor komoditi pertanian, persaingan komoditi yang sama antar daerah*, *kelembagaan petani yang belum menunjang, tata niaga lokal komoditi pertanian yang kurang menguntungkan*, dan *kapasitas pasca panen yang masih rendah.*

*Namun peluang urusan pertanian akan meningkat jika memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang.* Pengaruh era Industri 4.0[1] secara umum kepada bidang pertanian telah memberikan dampak secara langsung, teknologi informasi pada saat telah dimanfaatkan di bidang pertanian misalnya dalam perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana produksi pertanian, pengawasan pemanfaatan sarana produksi pertanian, pemasaran hasil pertanian dan sebagainya. Tingkat keakuratan dan Kelengkapan data informasi bidang pertanian menentukan tingkat keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan para petani. Para petani bisa mendapatkan informasi harga komoditi dengan cepat dan uptodate di daerah sasaran pemasaran sehingga bisa memutuskan kapan menjualnya, kemana menjualnya, berapa jumlah komoditi yang dibutuhkan konsumen, dan berapa harga komoditi akan dijual. Selain itu banyak bermunculan laman aplikasi pertanian yang bisa didownload di playstore yang dapat mendukung kinerja di bidang pertanian. Misalnya tentangcara pemupukan, cara identifikasi hama penyakit, penjualan hasil pertanian, dan sebagainya. Untuk tingkat Kabupaten Probolinggo upaya pemanfaatan teknologi informasi masih perlu

dikembangkan. Utamanya pada tahap budidaya yang masih sangat sedikit dan tingkatanya masih rendah.

Sedangkan untuk produksi pertanian mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024), dimana produksi pertanian mengalami kenaikan dan juga penurunan di beberapa komoditas, salah satu komoditas tanaman pangan padi menurun akibat pergeseran musim dan pola tanam, dimana tanaman padi mengalami penurunan di tahun 2024. Untuk tanaman lainnya dari tahun ke tahun secara perlahan mengalami penurunan produksi (*tanaman tembakau, tebu, kedelai, kelapa, dan lainnya*). Berdasarkan data yang ada penurunan ini terjadi karena alih komoditi (*ke padi atau ke jagung atau ke sengon*) atau terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (*pemukiman, jalan, dan lainnya*).

Selain itu terdapat bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Probolinggo. Bencana yang ada adalah Bencana Banjir, Longsor, Kekeringan, hujan tidak pada musimnya, dan erupsi gunung Bromo. Kerugian terjadi karena kerusakan tanaman atau musnahnya tanaman. Bencana alam hampir terjadi setiap tahunnya.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo tahun 2016 bersama dengan Universitas Airlangga menunjukkan bahwabahwa **permasalahan terbesar** yang dirasakan petani di Kabupaten Probolinggo adalah **masalah Stabilitas Harga**. Hingga sekarang harga komoditi pertanian belum memuaskan dan belum dapat memberikan kesejahteraan kepada petani secara layak.

Secara umum ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran masih menjadi permasalahan. Ketidakseimbangan ini merugikan produsen (petani) dan konsumen (masyarakat) karena

ketidakpastian yang tinggi menyebabkan barang/komoditi pertanian tidak tepat waktu panen dan konsumsi, dan menimbulkan kerugian akibat kerusakan-kerusakan yang dialaminya selama masa tunggu antara panen dengan masa konsumsi.

Masalah harga ini juga disebabkan oleh petani tidak bisa mengelola hasil produksinya, dimana petani secara umum tidak mempunyai kemampuan untuk menyimpan hasil panennya secara maksimal beberapa sebab antara lain :

- Petani terikat untuk segera menjual dengan para pemodal yang memberikan sarana produksi saat budidaya
- Petani membutuhkan dana untuk kehidupan sehari-hari;
- Hasil panen tidak maksimal (rusak akibat serangan OPT), sehingga dijual dengan dengan umur tanaman tidak maksimal
- Biaya panen semakin mahal, misalnya ketiadaan prasarana (jalan usaha tani)
- Petani tidak memanen hasil panennya sendiri, petani tidak mau mengalami keruwetan dalam masalah panen dan pemasaran.

**Stabilitas harga komoditi pertanian**, Harga komoditi pertanian setiap tahun selalu mengalami fluktuasi, dimana hal tersebut telah menyulitkan bagi produsen dan konsumen. Tingkat harga komoditi pertanian terkait dengan tingkat produksi yang selalu berubah setiap waktu dan keadaan. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) terjadi lonjakan inflasi beberapa kali akibat tingkat harga komoditi pertanian, utamanya tanaman pangan (*padi*) dan tanaman hortikultura (*bawang merah* dan *cabe*). Beberapa sebab utama fluktuasi harga komoditi pertanian yang tinggi antara lain :

- Produksi komoditi yang sama di daerah lain, dengan sering terjadinya bencana alam yang mengakibatkan puso menyebabkan lonjakan harga komoditi;
- Petani kebanyakan sangat tergantung kepada pola pemasaran tradisional. Sebagaimana contohnya terjadi pola kemitraantradisional pemasaran bawang merah yang melibatkan petani, kios pertanian, pedagang lokal, pengepul, pedagang besar dimana proses pembiayaan yang didapatkan oleh petani pada awal budidaya membawa konsekuensi pada penjualan hasil panen yang tidak menguntungkan para petani dibandingkan potensi keuntungan yang seharusnya didapatkan.
- Kualitas yang menurun akibat perubahan cuaca dan serangan hama penyakit;
- Semakin mudahnya akses teknologi informasi mempengaruhi perubahan harga komoditi secara cepat;
- Kebijakan impor komoditi pertanian, isue impor bagi petani sering dianggap tidak berpihak kepada para petani, pada beberapa kasus petani tebu sering melakukan proses terhadap kebijakan impor gula oleh pemerintah. Sistem pasar bebas menyebabkan hasil lelang gula harus berhadapan dengan gula impor, sehingga menyulitkan peningkatan harga gula lokal;
- Tidak tersedianya sarana pasca panen dan pengolahan komoditi pertanian yang memadai dalam mendongkrak daya saing komoditi pertanian.Hal ini terjadi pada komoditi tebu, dimana animo petani tebu dalam budidaya sering terkendala dengan proses penggilingan tebu di pabrik gula. Harapan yang tinggi sering tidak tercapai karena hasil

proses penghitungan rendemen dianggap rendah, dengan beberapa sebab seperti antrian penggilingan yang panjang.

- Kurang sesuainya mutu komoditi dengan permintaan pasar, Hal ini terjadi pada tanaman jagung, Dimana hasil panen jagung Kabupaten Probolinggo kurang memenuhi mutu produk yang diharapkan beberapa perusahaan pembeli karena dianggap masih kotor, tingkat kerusakan yang besar. Disini pengaruh varietas benih jagung dengan produktivitas yang tinggi kadang tidak bagus jika diolah dengan teknologi pasca panen yang dimiliki perusahaan tersebut, akibatnya jagung Probolinggo dibeli dengan harga yang lebih rendah dari jagung wilayah lain (Banyuwangi atau Situbondo)

Disamping permasalahan yang dirasakan oleh petani sebagaimana hasil survei diatas maka terdapat persoalan besar yaitu masalah perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan bencana alam yang membawa konsekuensi kinerja bidang pertanian. Sedangkan untuk menjaga tingkat kestabilan harga komoditi (terutama komoditi hortikultura) diperlukan kemitraan, namun hal tersebut tidak mudah. Selama ini para petani kesulitan mencari pihak yang dapat diajak bermitra secara langsung dalam menampung hasil panen mereka. (dicek dl dgn RPJMD teknokratik)

Banyak tanaman buah dan tanaman perkebunan tahunan (*misalnya mangga, alpokat, kelapa, dan kopi*) yang mengalami penurunan produktivitas, beberapa penyebabnya antara lain **tanaman tua** atau **rusak** akibat diserang penyakit sehingga perlu dilakukan **eradikasi**.

**Pandemi covid 19,** pada tahun 2020 bidang pertanian mengalami dampak dari pandemi Covid 19 dimana secara umum terjadi **penurunan permintaan** atas hasil pertanian misalnya tanaman hortikultura (sayuran kubis, kentang, dll) mengalami kesulitan memasarkan karena petani/ pedagang tidak bisa melintas antar daerah / lintas kabupaten karena adanya lockdown.Selain itu para petani tembakau juga melakukan demontrasi ke kantor DPRD Kabupaten Probolinggo karena komoditi tembakaunya tidak dibeli oleh gudang tembakau sehingga harga tembakau jatuh penyebabnya adalah karyawan pabrik rokok terkena covid 19 sehingga produksi rokok berkurang atau berhenti.

**Serangan hama penyakit,** Sejak beberapa tahun terakhir sering terjadi serangan organisme pengganggu tanaman secara masif sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar.Terjadinya serangan OPT yang masif ini bersamaan dengan perubahan iklim yang tidak pasti (hujan sepanjang tahun ataupun cuaca yang sangat panas)sehingga mendorong perkembangbiakan OPT yang ekstrim.

Tabel 3.1.2. Luas (Ha) serangan OPT tahun 2020-2024

| Padi | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penggerek Batang | 159,15 | 159,15 | 147,5 | 226,86 | 206,20 |
| 2 | Tungro | 5,7 | 5,7 | 46,7 | 28,65 | 16,70 |
| 3 | Xanthomonas sp | 142,41 | 142,41 | 104,2 | 226,73 | 65,45 |
| 4 | Burung | 80,8 | 80,8 | 15,1 | 0,8 | 0 |
| 5 | Keong Mas | 1,1 | 0 | 0 | 0,6 | 0,2 |
| 6 | Pyricularia sp | 49,3 | 49,3 | 4,9 | 3 | 15,6 |
| 7 | Ulat Grayak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Walang Sangit | 28,4 | 49,6 | 4,9 | 0,5 | 0 |
| 9 | Blast Daun | 54,2 | 24,9 | 8,4 | 58,5 | 5,40 |
| 10 | Kahat Hara / Keasaman Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tikus | 103,1 | 45,7 | 0,3 | 31,3 | 3,8 |
| 12 | Hama Putih | 4,8 | 11,3 | 15,5 | 0 | 0 |
| 13 | WBC | 97,7 | 23,3 | 10,4 | 106,6 | 116,7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Hama P. Palsu | 0 | 0 | 11,85 | 7,5 | 8,3 |
| Jagung | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 15 | Karat Daun | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ulat grayak | 257,6 | 164,9 | 189,08 | 177,16 | 124,95 |
| 17 | hawar daun | 23,8 | 7253 | 10,3 | 0,3 | 1 |
| 18 | bulai | 70,4 | 47,3 | 55,2 | 5,9 | 3,5 |
| 19 | peng tongkol | 30,9 | 10,6 | 30,97 | 33,7 | 6,2 |
| 20 | Lalat bibit | 1,73 | 18,65 | 5,3 | 5,8 | 0 |
| 21 | Tikus | - | 3,6 | 11,1 | 3,3 | 2 |
| Bawang Merah | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 22 | Spodoptera exiqua | 298,25 | 382,9 | 134,4 | 85,6 | 10,5 |
| 23 | coletroticum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | layu fusarium | 14,3 | 16,35 | 97,5 | 21,95 | 6 |
| 25 | liriomyza sp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | mati pucuk | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Kentang | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 27 | Layu Fusarium | 4,75 | 0 | 0 | 1,8 | 0 |
| 28 | liriomyza sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | phytoptora | 17,13 | 7,1 | 28,5 | 0,3 | 0 |
| Kubis | | Tahun 2020 | | | | |
| 30 | crosidolonia | 1,05 | 0 | 3 | 4,7 | 0 |
| 31 | plutella sp | 7,71 | 5 | 3,1 | 7,7 | 0 |
| Cabe Besar | | Tahun 2020 | | | | |
| 32 | Virus Kuning | 21,85 | 6,8 | 4,3 | 1,2 | 1 |
| 33 | thrip | - | 14 | 0 | 1,7 | 0,3 |
| 34 | lalat buah | 25,8 | 23,7 | 7,45 | 6,2 | 2,7 |
| 35 | layu bakteri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | antraknose | 2,6 | 7,6 | 3,9 | 7,5 | 2,4 |
| Cabe Kecil | | Tahun 2020 | | | | |
| 37 | Antraknose | 0 | 8,4 | 39,44 | 14,3 | 0,5 |
| 38 | virus kuning | 78 | 200,3 | 81,73 | 4,6 | 19,3 |
| 39 | thrips | 5,3 | 3,2 | 4,65 | 13,5 | 0 |

*Sumber: Bidang Sarana, Penyuluhan dan Pengendalian Pertanian (2020-2024)*

Serangan hama penyakit pada tanaman padi – berdasarkan kawasan padi terdapat perbedaan karakter serangan OPT seperti misalnya penggerek batang yang lebih banyak dibandingkan jenis OPT lain.

Pada tanaman cabe kecil banyak terjadi serangan hama virus kuning, pada daerah centra penghasil cabe, sehingga banyak

mempengaruhi produksi cabe khususnya di wilayah probolinggo raya dan sekitarnya.

Usaha peternakan tidak luput dari serangan penyakit yang melumpuhkan perekonomian Masyarakat peternakan di kabupaten Probolinggo, puncaknya ditahun 2022 adanya wabah Penyakit mulut dan kuku (PMK) dimana kejadian tersebut banyak menguras populasi sapi, kambing dan domba yang ada di kabupaten probolinggo, Adapun data penyakit hewan selama kurun waktu 2019-2024 dapat di lihat pada tabel berikut :

| No | Nama Penyakit Hewan | TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Abses | 3 | 3 | 2 | 214 | 22 | 190 | TIDAK MENULAR |
| 2 | Artritis | 1 | 2 | 2 | | - | - | TIDAK MENULAR |
| 3 | Ascariasis | 18 | 18 | 15 | | - | - | MENULAR |
| 4 | Asidosis | 17 | 23 | 20 | | 61 | 9 | TIDAK MENULAR |
| 5 | Atrofi Ovarium | | | | | | 1 | TIDAK MENULAR |
| 6 | avitaminosis | 9 | 9 | 10 | | 1 | 365 | TIDAK MENULAR |
| 7 | Ambruk, Anorexia | | | | 651 | | - | TIDAK MENULAR |
| 8 | Anestrus | | | | 386 | | - | TIDAK MENULAR |
| 9 | Ambing bengkak | | | | 5 | | - | TIDAK MENULAR |
| 10 | Bovine Ephemeral Fever | 271 | 277 | 256 | | 131 | 2.146 | TIDAK MENULAR |
| 11 | Bovine Tuberculosis | | | | | | 1 | MENULAR |
| 12 | Bronchitis P. | - | 7 | 4 | | - | - | TIDAK MENULAR |
| 13 | Bovine Viral Diarrhea | - | 0 | 0 | | 9 | - | MENULAR |
| 14 | Bulu kusam, mencret | | | | 499 | | - | TIDAK MENULAR |
| 15 | Bulu kusam, kekurusan | | | | 4 | | - | TIDAK MENULAR |
| 16 | Bunting | | | | | | 3 | TIDAK MENULAR |
| 17 | borok, bulu rontok, gatal | | | | 10 | | - | TIDAK MENULAR |
| 18 | Berahi tenang | | | | 114 | | - | TIDAK MENULAR |
| 19 | Cacingan | 222 | 232 | 227 | | 88 | 8.834 | MENULAR |
| 20 | Colibacillosis | 9 | 9 | 6 | | - | 4 | TIDAK MENULAR |
| 21 | Corpus Luteum Persisten | 448 | 448 | 398 | | 3 | 2 | TIDAK MENULAR |
| 22 | CRD | 200 | 200 | 130 | | - | - | MENULAR |
| 23 | Diare | | 27 | 35 | | - | - | TIDAK MENULAR |
| 24 | Distokia | 2 | 5 | 30 | | 10 | 13 | TIDAK MENULAR |
| 25 | Dermatitis | | | | | 1 | 10 | TIDAK MENULAR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Distomatosis | 1 | 1 | 1 | | 60 | - | MENULAR |
| 27 | Demam | | | | 494 | | - | TIDAK MENULAR |
| 28 | Endometritis | 504 | 507 | 347 | | - | 1.082 | TIDAK MENULAR |
| 29 | Enteritis | 67 | 73 | 47 | | 51 | 456 | TIDAK MENULAR |
| 30 | Eutokia | | | | | 47 | 193 | TIDAK MENULAR |
| 31 | Footroot | | | | | | 1 | TIDAK MENULAR |
| 32 | Fraktura | 5 | 6 | 4 | | 2 | 6 | TIDAK MENULAR |
| 33 | Gatal, perkulitan | | | | 22 | | - | TIDAK MENULAR |
| 34 | Gastroenteritis | | | | | | 3 | TIDAK MENULAR |
| 35 | Hernia | 1 | 1 | 3 | | - | - | TIDAK MENULAR |
| 36 | Hipofungsi ovari | 1.350 | 1350 | 1250 | | 40 | 2.282 | TIDAK MENULAR |
| 37 | Hypocalcemi | | | 5 | | - | - | TIDAK MENULAR |
| 38 | Indigesti | - | 37 | 25 | | 9 | 973 | TIDAK MENULAR |
| 39 | Infectious Bovine Rhinotracheitis | | | | | 80 | 10 | MENULAR |
| 40 | Infeksi Saluran Pernapasan Atas | | | | | | 18 | MENULAR |
| 41 | Infestasi Kutu | | | | | 5 | 45 | MENULAR |
| 42 | Involusi Tertunda | | | | | 13 | 6 | TIDAK MENULAR |
| 43 | Kecelakaan | - | 1 | 1 | | 10 | 12 | TIDAK MENULAR |
| 44 | Kekurangan Calsium | 1 | 1 | 0 | | 15 | 13 | TIDAK MENULAR |
| 45 | Keracunan | 2 | 2 | 12 | | 1 | - | TIDAK MENULAR |
| 46 | Kembung, kelainan rumen | | | | 10 | | - | TIDAK MENULAR |
| 47 | Kawin Berulang | | | | 865 | | 73 | TIDAK MENULAR |
| 48 | Keguguran | | | | 12 | | 1 | TIDAK MENULAR |
| 49 | Kesulitan bernafas | | | | 1 | | - | TIDAK MENULAR |
| 50 | Kesulitan lahir | | | | 42 | | - | TIDAK MENULAR |
| 51 | Kelainan kuku | | | | 3 | | - | TIDAK MENULAR |
| 52 | Konjunctivitis | | | | | | 22 | MENULAR |
| 53 | Lain-lain PHM | 303 | 400 | 0 | | - | - | TIDAK MENULAR |
| 54 | Laminitis | 1 | 1 | 0 | | 22 | 61 | TIDAK MENULAR |
| 55 | Lumpy Skin Disease | | | | 1 | 99 | 217 | MENULAR |
| 56 | Luka berdarah | | | | 126 | | - | TIDAK MENULAR |
| 57 | Malnutrisi | 7 | 14 | 10 | | 236 | 413 | TIDAK MENULAR |
| 58 | Myasis | | | | | 54 | - | TIDAK MENULAR |
| 59 | Mastitis | 18 | 23 | 29 | | 6 | 18 | TIDAK MENULAR |
| 60 | MCF | 1 | 1 | 1 | | - | - | MENULAR |
| 61 | Orf | | | | | | 12 | MENULAR |
| 62 | miasis | 8 | 10 | 5 | | - | 404 | TIDAK MENULAR |
| 63 | Panleukopenia | | | | | | 2 | MENULAR |
| 64 | Papilloma | | | | | | 1 | MENULAR |
| 65 | Penyakit Mulut dan Kuku | | | | 14379 | 115 | 160 | MENULAR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Penyakit Lain | 1.269 | 1286 | 989 | 151 | - | - | TIDAK MENULAR |
| 67 | Pneumonia | 1 | 1 | 5 | | 10 | 22 | TIDAK MENULAR |
| 68 | Prolap uteri | 5 | 15 | 25 | 6 | - | 7 | TIDAK MENULAR |
| 69 | Prolap vagina | 44 | 59 | 35 | 138 | 14 | 3 | TIDAK MENULAR |
| 70 | Pyometra | 2 | 2 | 45 | | - | - | TIDAK MENULAR |
| 71 | Pincang | | | | 66 | | - | TIDAK MENULAR |
| 72 | radang mata | - | 0 | 5 | | - | 1 | TIDAK MENULAR |
| 73 | Retensio Secundinarum | 36 | 42 | 49 | | - | 28 | TIDAK MENULAR |
| 74 | Ring Worm | 1 | 1 | 0 | | 101 | - | MENULAR |
| 75 | retensi placenta | | | | 185 | | - | TIDAK MENULAR |
| 76 | Scabies | 127 | 135 | 127 | | 14 | 575 | MENULAR |
| 77 | Silent Heat | 785 | 785 | 756 | | 11 | 65 | TIDAK MENULAR |
| 78 | Sistik ovari | 78 | 78 | 89 | | - | - | TIDAK MENULAR |
| 79 | Tanduk Patah | | | | | | 2 | TIDAK MENULAR |
| 80 | Tidak Diketahui | | | | | | 9 | TIDAK MENULAR |
| 81 | Tidak sakit (Pencegahan PHMS) | - | 0 | 0 | | - | 21.624 | TIDAK MENULAR |
| 82 | Tympany | 54 | 60 | 72 | | 13 | 156 | TIDAK MENULAR |
| 83 | Tumor | | | | | 74 | - | TIDAK MENULAR |
| 84 | Vaginitis | 1 | 1 | 5 | | - | - | TIDAK MENULAR |
| 85 | Vulnus | 7 | 7 | 0 | | 13 | 21 | TIDAK MENULAR |
| 86 | Vulvitis | 4 | 4 | 0 | | - | - | TIDAK MENULAR |
| **JUMLAH** | | **5.883** | **6.164** | **5.077** | **18.384** | **1.441** | **40.575** | |

**Ketersediaan air semakin terbatas,** Para petani dalam melakukan budidayanya tergantung kepada ketersediaan air, Selama kurun waktu 2020-2024 budidaya pertanian cenderung mengalami penurunan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah ketersediaan air, adanya kecenderungan penurunan indeks penanaman padi selama 5 tahun terakhir. Penanaman padi 3 kali menurun menjadi 2 atau 1 kali tanam. Penurunan luas tanam padi ini disebabkan oleh peralihan ke komoditi non padi yang lebih sedikit memerlukan air, seperti tanaman jagung, tembakau, ataupun tanaman hortikultura (cabe dan bawang merah). Di tahun 2024 terdapat program pompanisasi dari Kementerian Pertanian untuk menambah luas tambah tanam padi guna mendukung swasembada dan ketahanan pangan

nasional. Kabupaten Probolinggo mendapat target alokasi pompanisasi yang cukup besar yang tersebar di beberapa kecamatan dengan tujuan merubah pola tanam padi setahun penuh.

**Subsidi pupuk**, Para petani sering mengalami permasalahan dengan ketersediaan pupuk, dimana waktu tanam dan **ketesediaan pupuk tidak selalu sinkron**. Di wilayah yang agak jauh dari pusat perkotaan, petani sering tidak mendapatkan **pupuk yang berimbang** atau hanya menggunakan pupuk urea saja akibatnya produktivitasnya sangat rendah (*hal ini dibuktikan dengan data ubinan yang ada*). Penyebabnya adalah petani belum memiliki pengetahuan dan kemampuan/akses dalam mengaplikasikan teknologi pemupukan.

Upaya pemerintah dalam memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi melalui **E-RDKK** masih belum optimal sehingga bisa distribusi pupuk masih banyak yang salah sasaran dan harga tidak sesuai dengan HET. Saat ini Dinas Pertanian sedang mengembangkan aplikasi **PESAN PUBERS** guna memperketat manajemen alokasi, distribusi dan ketersedian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.

**Pasca panen,** masih belum optimal pasca panen komoditi pertanian Kabupaten Probolinggo menyebabkan harga jualtidak maksimal. Dimana penyebabnya kurangnya prasarana dan sarana yang memadai. Misalnya pada saat panen raya bersamaan dengan waktu musim hujan sehingga petani tidak bisa mengeringkan hasil panennya (gabahnya) karena tidak ada lantai jemur sehingga kadar airnya tinggi yang harga panennya jatuh. Karena itulah banyak perlakuan sistem jual tebas di Kabupaten Probolinggo, karena petani sendiri tidak ingin keruwetan terjadi pada dirinya.

**Penggunaan alsintan,** masih belum optimal, selama 5 (lima) tahun terakhir ini bantuan alsintan sangat banyak dan telah dibentuk kelompok-kelompok tanam panen (brigade alsintan). Namun seringkali alat mesin pertanian yang dibantukan tidak dapat diaplikasi secara optimal, penyebabnya adalah ketidaksesuaian alsintan mesin dengan kondisi lahan, suku cadang yang rusak. Bantuan alsintan yang terdahulu belum didukung kesiapan yang memadai tentang kelembagaan, ketrampilan kelompok, kesiapan prasarana utamanya jalan usaha tani.

Tabel 3.1.4. Kondisi alat mesin pertanian tahun 2025

| Jenis Alat/Mesin | Kondisi Baik/Rusak Ringan | Rusak Berat | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Traktor Roda Dua | 992 | 71 | 1.063 |
| Traktor Roda Empat | 14 | - | 14 |
| Tanam padi(Transplanter) | 48 | 3 | 51 |
| Tanam biji-bijian(Seeder) | 60 | - | 60 |
| Hand Sprayer dan Power Sprayer | 12.957 | 368 | 13.325 |
| Pengabut pestisida (Swing - Fog) | - | - | - |
| Emposan Tikus | 9 | 6 | 15 |
| Pembersih Gulma | 68 | 1 | 69 |
| Pompa air | 1.447 | 69 | 1.516 |
| Sabit Bergerigi | 1 | - | 1 |
| Pemotong padi tipe gunting(Reaper) | - | 1 | 1 |
| Pemotong padi tipe gendong(Paddy Mower) | 3 | - | 3 |
| Combine Harvester | 55 | 6 | 61 |
| Perontok Padi /Thresher | 948 | 25 | 973 |
| Pemipil Jagung /Cornsheller | 68 | 1 | 69 |
| Perontok Kedelai /Thresher | 8 | 1 | 9 |
| Perontok Multiguna (Padi, Jagung, Kedelai) | 16 | - | 16 |
| Pembersih Gabah /Winower | 13 | - | 13 |
| Pengering tipe datar /Flat Bed Dryer | 3 | - | 3 |
| Pengering tipe vertikal /Continuous Dryer | 3 | - | 3 |
| Penggilingan Padi Kecil /Small Rice Mill | 226 | - | 226 |
| Penggilingan Padi Menengah / Medium Rice Mill | 15 | - | 15 |
| Penggilingan Padi Besar / Large Rice Mill | 18 | - | 18 |
| Penyimpan hasil tanaman pangan (Silo) | 4 | - | 4 |
| Alat Pembuat Pupuk Organik | 46 | 6 | 52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (APPO)/Kompos | | | |

*Sumber : Statistik Pertanian Pertanian (2025)*

**Berkurangnya lahan pertanian baik lahan sawah maupun non sawah**, permasalahan alih fungsi lahan pertanian merupakan permasalahan yang terjadi di mana-mana, dan mengancam tingkat produksi hasil pertanian. Dari data penggunaan lahan terlihat bahwa terdapat penurunan penggunaan lahan untuk budidaya pertanian. Perubahan ini tidak bisa dihindari, namun yang perlu dilakukan adalah penataan alih fungsi lahan melalui penetapan RTRW dan RDTR, sehingga perubahan alih fungsi tidak liar dan merusak lahan pertanian yang masih berpotensi. Untuk saat ini telah ditetapkan LP2B yang berfungsi sebagai kendali perubahan lahan pertanian.

Tabel 3.1.5 Perbandingan luas penggunaan lahan Tahun 2020-2024

| Jenis lahan | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lahan Sawah** | 37.239 | 37.075 | 37.059 | 36.999 | 36.789 |
| **Lahan pertanian non Sawah** | 102.274 | 103.785 | 102.589 | 102.389 | 102.054 |
| **Lahan non Pertanian** | 21.915 | 20.286 | 21.484 | 21.223 | 22.433 |

*Sumber: Data Statistik Pertanian tahun 2020-2024.*

Namun pengendalian lahan ini masih banyak kendala diantaranya adalah belum adanya data kepemilikan LP2B **by name by adress.** Berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2015 tentang PLP2B, dalam pelaksanaan harus mempunyai data kepemilikan lahan pertanian di kawasan PLP2B dalam bentuk by name by adress.

Berkembangnya secara pesat pohon sengon di wilayah Kabupaten Probolinggo telah mengikis produksi tanaman pangan,

hortikultura, dan tanaman perkebunan. Perkembangan lima tahun terakhir ini telah terjadi alih fungsi tananam jagung, tanaman mangga, tanaman ubi kayu ke tanam sengon. Selain itu tanaman sengon di sinyalir sebagai penyebab kualitas tanaman pertanian lainnya, karena tanaman sengon dianggapmendominasi penyerapan unsur lain tanaman lainnya disekitarnya dan tinggi pohon sengon yang menutupi tanaman lainnya.

**Kelembagaan petani yang masih lemah**, jika dibandingkan dengan kelompok tani di Jawa Timur maka Kelompok tani di Kabupaten Probolinggo masih bisa dianggap tertinggal. Persoalan ini kelembagaan ini tentu saja sangat menentukan kinerja bidang pertanian di Kabupaten Probolinggo terutama bagaimana petani secara umum menerapkan teknologi pertanian yang ada.

Sebaran kelas kelompok tani ini yang perlu diperhatikan adalah kelompok tani Pemula yang cukup banyak di Kabupaten Probolinggo,jika dilihat korelasi antara kelompok pemula dengan kinerja maka terlihat bahwa daerah dengan kelompok pemula yang dominan juga mengalami kinerja yang tidak bagus.

Tabel 3.1.6. Data Kelas 1595 Kelompok Tani di Kabupaten Probolinggo[2]

| NO | KECAMATAN | KELAS KELOMPOK TANI | | | NO | KECAMATAN | KELAS KELOMPOK TANI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LANJUT | PEMULA | MADYA | | | LANJUT | PEMULA | MADYA |
| 1 | Sukapura | 8 | 15 | | 13 | Paiton | 39 | 48 | 4 |
| 2 | Sumber | 7 | 46 | | 14 | Besuk | 33 | 22 | 2 |
| 3 | Kuripan | 8 | 27 | | 15 | Kraksaan | 46 | 1 | 1 |
| 4 | Bantaran | 6 | 40 | | 16 | Krejengan | 26 | 24 | 1 |
| 5 | Leces | 6 | 17 | | 17 | Pajarakan | 7 | 28 | |
| 6 | Tegalsiwalan | 16 | 23 | | 18 | Maron | 29 | 33 | |
| 7 | Banyuanyar | 14 | 41 | | 19 | Gending | 29 | 12 | |
| 8 | Tiris | 11 | 62 | | 20 | Dringu | 7 | 40 | |
| 9 | Krucil | 7 | 288 | | 21 | Wonomerto | 27 | 22 | |
| 10 | Gading | 21 | 42 | | 22 | Lumbang | 9 | 40 | |
| 11 | Pakuniran | 27 | 45 | | 23 | Tongas | 28 | 27 | 1 |
| 12 | Kotaanyar | 14 | 65 | | 24 | Sumberasih | 28 | 32 | |

Sumber : Perbub 050/159/426.32/2022 ttg Poktan dan Gapoktan 2022

Selain itu terdapat kelompok petani yang berpotensi sehingga diharapkan dapat mengembangkan agribisnis lebih lanjut di masa akan datang. Dimana upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan legalitas lembaga melalui badan hukum.

Berikut ini disampaikan permasalahan di sektor pertanian berdasarkan pada komoditi pertanian yang menjadi fokus dari Kementerian Pertanian RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian kabupaten Probolinggo.

Ditingkat Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota lain mempunyai keragaman tanaman hortikultura yang lebih tinggi dalam jumlah yang besar. Dari tanaman sayuran semusim, tanaman buah-buahan, dan tanaman biofarmaka. perubahan pola produksi tanaman pertanian dimana tanaman **hortikultura** mempunyai kecenderungan yang meningkat sehingga secara perlahan menekan perkembangan tanaman pangan dan hortikultura. Sistem pasar bebas dan pemanfaatan teknologi informasi telah mempengaruhi secara langsung peningkatan produksi tanaman hortikultura (*cabai, bawang merah, kentang, kubis dll*). Para petani telah dapat memanfaatkan perkembangan **informasi** dan **akses pasar** sehingga dapat meningkatkan kesejahteraanya.Tanaman hortikultura yang selama 3 tahun terakhir berkembang dengan sangat pesat sehingga dapat merubah mindset pola tanam tanaman pertanian, tanaman hortikultura lebih memberikan keuntungan bagi para petani, karena harganya lebih menguntungkan dan para petani mendapatkan penghasilan lebih sering (setiap minggu) dari penjualan hasil pertaniannya, dan hal tersebut bisa terjadi sepanjang tahun jikapetani menguasai teknologi budidaya pertanian.

Berikut ini karakter komoditi pertanian di Kabupaten Probolinggo dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan :

a. **Tanaman Padi,**

Tanaman padi sebagai komoditi strategis nasional membuatnya menjadi komoditi yang **sifatnya inelastisitas**, dimana mulai proses budidaya hingga perdagangan gabah/beras terdapat **campur tangan pemerintah**. Karena sifatnya yang **inelastisitas** maka harga komoditi padi *tidak bisa terlalu tinggi maupun terlalu rendah*. Upaya pemerintah tesebut antara lain tanaman padi mendapatkan subsidi pupuk, bantuan benih, proteksi harga beras (HPP) dan penetapan kouta impor besar. Karena itulah keberadaan tanaman padi cenderung stabil setiap tahunan.

Perubahan kenaikan ataupun penurunan luas tanaman padi tergantung kepada kondisi yang terjadi, selama beberapa tahun terakhir kejadian yang mempengaruhi kenaikan luas tanamadalah adanya program dari pemerintah dan iklim yang cenderung basah. Sedangkan kejadian yang menurunkan luas tanaman padi adalah iklim yang kering,adanya serangan OPT yang masif pada tanaman padi, dan penurunan luas lahan pertanian.

Secara umum di Kabupaten Probolinggo Prasarana, sarana, dan sumber daya manusiayang mendukung pengembangan tanaman padi telah tersedia mulai dari sumber airirigasi, saluran irigasi, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, benih, penangkar benih, penggilingan padi, kelompok tanam, kelompok panen. Namun targetmeningkatkan produksi padi yang semakin tinggi sedangkan ketersediaan prasarana semakin berkurang

maka dibutuhkan ketersediaan air irigasi yang lebih besar melalui penyediaan prasarana (waduk atau embung besar) maupun pengelolaan air irigasi yang efisien.

Varietas yang banyak dikembangkan di Kabupaten Probolinggo antara lain IR64, Inpari, Mambaramo, Simbada, Situbagedit, Ciherang, dan beberapa varietas lainnya. Penggunaan benih di Probolinggo dataran tinggi sering tidak efisiensi (melebihi anjuran), sedang untuk di Probolinggo dataran rendah cukup maju dalam pemanfaatan benih. Hampir semua benih padiyang digunakan oleh petani di Kabupaten Probolinggo adalah benih berlabel dan unggul ini menunjukkan bahwa kesadaran penggunaan benih berlabel sudah tinggi, secara umum benih dari Banyuwangi cukup populer digunakan para petani di Kabupaten Probolinggo.

Permasalahan hama penyakit tanaman padi cukup banyak dimana hal ini dipengaruhi oleh perubahan iklim dan perubahan lingkungan. Perubahan-perubahan ini menyebabkan hama penyakit berkembangan dengan cepat dan timbul menimbulkan outbreak yang kadang lambat untuk ditangani. Pada tahun 2020 terjadi serangan hama penggerek batang yang masif yang menyebabkan ratusan hektar tanaman padi mengalami puso, dimana penanaman padi yang ekspansif dari tahun sebelumnya ternyata menyebabkan perubahan pola tanam yang signifikan dan menyebabkan perubahan lingkungan di areal pertanian sehingga hama berkembang dengan cepat. Apa yang terjadi kemudian adalah **resurjensi** pada tanaman padi sehingga pada para petani mengalami kesulitan dalam mengendalikan hama penyakit karena hama penyakit tidak mempan terhadap pestisida yang digunakan.

Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Probolinggo termasuk dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur, persoalannya adalah banyak teknologi pertanian yang tidak diterapkan di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan kendala penerapan teknologi pertanian antara lain : keterbatasan akses sarana produksi pertanian dan kemampuan petani yang masih rendah.

Range rata-rata produktivitas tanaman padi di kabupaten Probolinggo antara 3,05-7,58 ton/ha dengan rata-rata keseluruhan sebesar 54,55 ton/ha. Tentu saja hal ini menjadi suatu permasalahan.

**b. Tanaman Jagung,**

Tanaman jagung di Kabupaten Probolinggo cukup signifikan jumlahnya,fungsi utama komoditi jagung di Kabupaten Probolinggo adalah sebagai makanan sehari-hari dan sebagai **pakan ternak**. Untuk jagung lokal banyak ditemukan di daerah yang kering atau dataran tinggi serta dimanfaatkan sebagai konsumsi manusia. Jagung lokal banyak dimanfaatkan sebagai cadangan pangan para petani.Sedangkan untuk tanaman jagung komposit dan jagung hibrida lebih banyak digunakan sebagai pakan ternak.Di beberapa tempat di Kabupaten ProbolinggoTiris, Maron, Sumberasih, Paiton, dan lain-lain tanaman jagung memang dari awal dimaksudkan sebagai pakan cadangan ternak sapi jika pakan sapi dari bahan lain mengalami kesulitan untuk didapatkan.Dibeberapa tempat didapatkan penjualan secara khusus hijauan tanaman jagung (tebon) untuk pakan sapi.

Komoditi jagung di Kabupaten Probolinggo cukup berkembang luas budidayanya dan intensitasnya, namun masih terdapat permasalahan yang mengganggu peningkatan kualitasnya, terutama pada proses **pasca panen** yang kurang baik.Dimana titik kritisnya adalah pada saat **penyimpanan**

**komoditi jagung yang kurang bersih dan lembab bisa** menyebabkan aflatoxin.Hal ini dianggap membahayakan bagi industri pakan ternak sehingga Penurunan kualitas ini,menyebabkan harga komoditi jagung tidak maksimal.

Di Kabupaten Probolinggo terdapat gudang swasta yang digunakan untuk menampung hasil panen jagung dari beberapa daerah sekitar Probolinggo (Banyuwangi, Situbondo).

c. **Tanaman Mangga,**

Terdapat kurang lebih 1 juta pohon mangga di Kabupaten Probolinggo, dimana sebagian besar populasi pohon mangga tersebut terdapat di halamandan pekarangan rumah warga. Namun kondisi inijika digunakan skala usaha yang besar maka akan sangat menyulitkan. Karena itulah maka selama ini belum terdapat skala usaha komoditi manggadi Kabupaten Probolinggo yang menguntungkan secara berkelanjutan.

Usaha ekonomi dari pengusahaan komiditi mangga dalam masih menggunakan cara-cara yang tradisional,yang mana sifatnya adalah skala kecil, menyebar ke pelosok-pelosok daerah, keragaman yang besar dan sering melibatkan para pedagang kecil.Dari gambar di samping terlihat bagaimana keragaman varietas di Kabupaten Probolinggo cukup tinggi.Walaupun Kabupaten Probolinggo terkenal sebagaimana sebagai destinasi kawasan mangga, namun hal tersebut belum menjadi daya saing yang berpengaruh secara nyata bagi masyarakat,walaupun Kabupaten Probolinggo sebagai penyedia mangga yang berkualitas akan terancam jika brand image tidak ada perbaikan yang cukup signifikan.

Dari data Sensus Pertanian 2013 terdapat **248.194 buah pohon mangga** yang digunakan **untuk usaha** (dijual) Selebihnya digunakan untuk konsumsi sendiri oleh masyarakat biasa. Upaya-upaya untuk meningkatkan ke skala usaha telah dilakukan pada beberapa tahun terakhir ini,beberapa penerapan teknologi pertanian telah dilakukan dan difasilitasi, dan telah timbul beberapa usaha baru yang bisa meningkatkan nilai tambah dari komoditi mangga. Dengan penggunaan SOP dan GAP komoditi mangga, terdapat peningkatan kualitas komoditi mangga mulai dari budidaya, pasca panen, hingga pemasaran komoditi.

Produktivitas tanaman mangga mengalami penurunan rata-rata dari tahun-ke tahun hal ini terjadi karena banyak tanaman mangga yang semakin tua. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya tanaman mangga yang dibongkar akibat tidak produktif lagi.

### d. Tanaman cabe rawit dan cabe merah

Tanaman cabe rawit untuk ini disamping cenderung berkembang cepat namun juga mengalami fluktuasi naik-turun, dalam prakteknya penjualan cabe kebanyakan dengan **harga satuan** dan **bukan sistem tebas**. Hal ini dikarenakan tanaman cabe rawit yang bisa dilakukan beberapa kali panen (± 11 kali bahkan hingga satu tahun) sehingga tingkat harga cabe tergantung kepada permintaan pasar. Pemintaan cabe banyak ke daerah Surabaya

Pola tanam cabe rawit di Kabupaten Probolinggo dari tahun ke tahun berikut terakhir mengalami perubahan cepat, dimana pengaruh iklim dan harga dari luar daerah sangat berpengaruh. Dengan ketersediaan **jaringan komunikasi** membuat tingkat harga cabe rawit menjadi volatil karena tingkat harga dari daerah lain dengan cepat dapat diketahui. Kebutuhan cabe rawit sangat tinggi karena itulah maka

petani sangat menyenangi budidaya cabe rawit namun resiko penurunan harga ini telah membuat budidaya cabe rawit terkendali. Sifat komoditi cabe yang tidak bisa disimpan lama **(*Perishable*)** setelah dipanen bisa menjadi kerugian yang cukup besar.

**e. Tanaman Kentang,**

Budidaya kentang yang terbanyak berada diSumber dan Sukapura tergantung kepada ketersediaan air, pada musim kemarau kebanyakan petani sudah tidak lagi melakukan budidaya kentang.Sehingga banyak dari mereka yang tidak melakukan aktivitas lagi di sektor pertanian pada bulan-bulan itu. Peningkatan produksi kentang dengan menyediakan prasarana air akan menjadi salah satu solusi yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Selama ini produktivitas tanaman kentang di Kabupaten Probolinggo masih belum optimal, dimana range produktivitas antara 8 hingga 13 ton/ha. Padahal kapasitas produktivitas tanaman kentang bisa mencapai 40 ton/ha.

Sementara itu harga benih kentang bersertifikat sendiri masih dianggap mahal oleh petani. Produksi benih yang dihasilkan oleh kebun benih kentang Dinas Pertanian di desa Cepoko Sumber masih terbatas sekali. Pada kenyataan masih banyak petani kentang yang menggunakan benih kentang tanpa sertifikat/Benih Jabal (Benih Antar Lapang). Untuk itulah maka diperlukan pembinaan penangkar-penangkar benih tanaman kentang untuk menunjang peningkatan produktivitas tanaman kentang di Kabupaten Probolinggo, dengan biaya yang lebih efisien.

Pengusahaan budidaya kentang diSumber dan Sukapura mempunyai komposisi yang lebih luas dari pada luas pengusahaan di wilayah Probolinggo lainnya, sehingga hal ini bisa membantu peningkatan kesejahteraan para petani kentang di Sumber dan

Sukapura, sedangkan fluktuasi harga kentang tidak setajam yang terjadi pada tanaman bawang merah.

Terdapatnya kebijakan tentang benih kentang yang mengharuskan benih kentang hanya **sampai G2 saja**, ternyata telah membawa dampak yang sangat signifikan selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Dampak yang dimaksud antara lain penurunan luas tanaman dan produksi kentang pada 5 tahun tersebut dimana dampak kebijakan ini bisa dirasakan hingga saat ini**. *Kebijakan dari Kementerian RI yang bertujuan baik bagi pengembangan sistem pembenihan ternyata dalam implementasi ternyata memberikan dampak kurang mengurangi***, sehingga harga benih kentang menjadi mahal dan benih menjadi berkurang banyak. Pada kenyataannya **petani kentang sendiri lebih menyukai benih G4** yang bisa memberikan produktivitas yang lebih menguntungkan.

### f. Tanaman Kubis

Kebanyakan panen dengan sistem tebas sehingga sulit untuk pengembangan pasca panen Budidaya tanaman kubis dilakukan seperti halnya tanaman kentang. Disparitas harga tanaman kubis antar waktu adalah tinggi, pengaruh jumlah panen dan umur kubis yang tidak bisa lama menjadikan harga kubis bisa turun ke harga yang terendah. Keterbatasan sarana prasarana, teknologi pasca panen, dan ketersediaan air menjadikan keterbatasan kemampuan petani untuk mengatur budidaya hortikultura di kawasan gunung Bromo.

Dibanding 7 tahun lampau tanaman kubis mengalami **penurunan** luas tanaman **± 2000 Ha**, hal ini terjadi karena adanya kebijakan dari **pihak Perhutani yang tidak memberikan ijin** budidaya tanaman semusim di lahan milik perhutani. Sehingga banyak tanaman kubis diganti tanaman tahunan (kebanyakan tanaman kopi) yang dianggap bisa sebagai tanaman konservasi sehingga melindungi hutan milik perhutani.

## g. Tanaman Bawang merah

Pengembangan tanaman bawang merah mengacu kepada masterplan dan action plan yang dimiliki Dinas Pertanian Namun persoalan bawang merah saat ini Adalah **harga bawang merah** yang cenderung stabil rendah, hal ini terjadi karena Kementeriaan Pertanian RI melakukan pengembangan bawang merah di daerah-daerah di luar sentral produksi bawang merah sehingga saat ini sudah banyak daerah yang mengembangkan bawang merah karena itulah tidak heran jika tidak ada lonjakan harga bawang merah.

Berdasarkan pemetaan yang telah dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo maka per desa di wilayah Kabupaten Probolinggo dapat dibagi menjadi 3 tipe kawasan (*Pertumbuhan ~ 57 desa, Pengembangan~24 desa, dan Pemantapan~31 desa*). Desa-desa pada daerah Pemantapan dan Pengembangan sebagian besar di Dringu, Tegalsiwalan, Leces, Gending, dan Banyuanyar. Sedang kawasan pertumbuhan dan pengembangan bawang merah ada di 10 lainnya. Pembagian kawasan tersebut berdasarkan kepada besaran luas penanaman bawang merah dan kapasitas produksi. Dari pembagian kawasan tersebut dapat dilihat ketersediaan sarana prasarana penunjang produksi tanaman bawang merah. Mulai dari irigasi, alsintan, pupuk pestisida, gudang penyimpan, dan sentra pasar bawang merah.

Terdapat permasalahan yang terus menerus terjadi selama bertahun-tahun yaitu over produksi yang mengakibatkan harga jatuh. Kejadian tahun sebelum 2016 yang harga bawang merah mencapai lebih Rp 50.000,-/kg untuk saat sudah terjadi lagi, malahan harga bawang merah bisa sampai kisaran Rp 10.000,-/kg.

Tingkat kesulitan dalam berbudidaya bawang merah cukup tinggi. Bawang merah sangat tergantung kepada cuaca dan adanya organisme pengganggu tanaman. Serangan ini setidaknya telah menurunkan produktivitas tanaman bawang merah dan menaikkan biaya pemeliharaan terutama obat-obatan pestisida.

Tabel 3.1.9. Serangan Hama penyakit utama pada bawang merah

| Nama OPT | Luas serangan OPT Bawang merah Kabupaten Probolinggo (Ha) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| Spodoptera Exiqua | 382,9 | 134,4 | 85,6 | 10,5 |
| Mati pucuk | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Layu fusarium | 16,35 | 97,5 | 21,95 | 6 |

Sumber : Bidang sarana, penyuluhan dan pengendalian pertanian (2024).

Varietas bawang merah Biru Lancor yang dimiliki Kabupaten Probolinggo menuntut budidaya bawang merah dilakukan pada musim kemarau. Jika dilakukan pada musim hujan maka akan timbul kerusakan atau terjadi puso. Kejadian seperti tahun 2013 terjadi kekurangan benih bawang merah tidak terjadi lagi, karena itulah harga benih bawang saat ini cukup stabil.

Kelembagaan semacam **Asosiasi Bawang Merah** yang ada sekarang sedikit telah berperan dalam menyalurkan kepentingan semua pihak yang terkait dengan komoditi bawang merah, antara lain para petani bawang merah, pedagang bawang, penangkar bawang merah, pengolah hasil bawang merah, dan lain-lain sebagainya. Kasus plasi selama beberapa tahun terakhir telah mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan.

## h. Tanaman bawang putih

Di Kabupaten Probolinggo tanaman bawang putih merupakan komoditas pertanian hortikultura yang hanya bisa tumbuh dan berkembang di wilayah dataran tinggi, karena bukan tanaman asli kabupaten probolinggo maka sampai saat ini produksi bawang putih cenderung turun bahkan di tahun 2024 produksinya sampai 0 (sesuai data statistic pertanian).

## i. Tanaman Tembakau

Secara umum tanaman tembakau di Kabupaten Probolinggo terdiri dari jenis yaitu tembakau **Paiton VO**, tembakau **Jawa**, dan tembakau **Kesturi**. Segala perputaran ekonomi yang terkait tembakau terdapat di Kabupaten Probolinggo mulai dari budidaya tembakau, perdagangan tembakau, gudang tembakau, dan pabrik rokok. Untuk tembakau Paiton VO berada di kawasan timur (*Paiton, Pakuniran, Kotaanyar, Gading, Besok, Krejengan, Pajarakan, dan Kraksaan*) dimana dalam pemasarannya mayoritas sudah melalui gudang-gudang tembakau yang berafilitasi dengan PT. Gudang Garam, Philip Morris dan PT. Djarum.

Setiap tahun sudah terdapat komunikasi antara pemerintah Kabupaten Probolinggo, pihak gudang tembakau, dan petani tembakau tentang **jumlah kebutuhan tembakau** gudang sehingga diharapkan bisa meminimalisir terjadinya kerugian para petani akibat **over produksi**.

Untuk tembakau jawa dan tembakau kesturi kebanyakan berada di wilayah barat, yaitu tembakau kesturi di Tongas, tembakau Jawa di Wonomerto dan Tongas. Pola pemasaran kedua tembakau adalah cara-cara tradisional yang sudah cukup lama, dengan segmen pasar yang tradisional pula.

Dalam pengembangan tanaman tembakau terkendala dengan adanya serangan penyakit keker, dimana serangan terjadi pada spot-spot di areal budidaya tembakau, diperkirakan terjadinya serangan ini karena adanya penyakit dengan inang tanaman pertanian yang ada di kawasan tersebut, untuk itulah perlu dibuatkan pemetaan budidaya tanaman pertanian, sehingga pengendalian hama penyakit dapat lebih maksimal lagi. Selain itu perubahan pola tanam di kawasan tanaman tembakau, dimana penyebab perubahan itu Adalah alih komoditi tembakau ke tanaman pertanian lainnya.

## j. Tanaman Tebu,

Perkembangan tanaman tebu semakin tahun semakin menurun, terdapat permasalahan dalam pengembangannya walaupun tebu merupakan tanaman strategis nasional. Saat ini tanaman tebu mayoritas dibudidayakan di daerah lahan kering, sedang petani tebu semakin terbatas jumlahnya, tanaman tebu yang umur panennya lebih 1 tahun membuat para petani dengan lahan kecil tidak akan melakukan penanaman karena uang hasil panen yang seharusnya diterima terlalu lama untuk ditunggu. Di Indonesia sendiri sudah berdiri **pabrik-pabrik gula swasta**, namun persoalannya adalah semakin sedikit lahan yang bisa digunakan untuk budidaya tebu. Berkaca dari itu maka pabrik-pabrik gula tersebut mengalami kekurangan bahan baku. Alasan dari lahan sedikit inilah maka **impor raw sugar** menjadi alternatif yang mudah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh Indonesia.

Harga tebu jatuh akibat ***hasil lelang*** tidak mencapai harga yang bagus. Tentu saja hal ini menyebabkan keuntungan para petani menipis, sehingga di tahun-tahun berikutnya banyak petani tidak mau lagi menanam tebu. Sehingga produksi tebu (batangan) di Kabupaten Probolinggo tahun 2022 s/d 2024 mengalami penurunan. Persoalan lainnya adalah para petani mayoritas menanam di lahan non pertanian yang airnya sangat kurang dan hanya mengandalkan dari datangnya hujan saja sehingga tanaman tebu mengalami penurunan produktivitas, tentu saja hal ini menimbulkan kerugian bagi para petani.

## k. Tanaman Kopi,

Tanaman kopi di Kabupaten Probolinggo saat ini perkembangan terbanyak adalah di hutan milik perhutani. Sedang di lahan milik petani sendiri banyak yang sudah tua sehingga tentu saja produktivitas rendah. Di daerah Probolinggo barat lahan milik pertanian kurang perawatan, beberapa tanaman sudah **berumur tua** dan **tanamannya tinggi** sehingga menyulitkan dalam pemeliharaan

tanaman kopi. Kendala pengembangan lainnya adalah **kurangnya tanaman naungan** bagi benih kopi yang masih berumur muda sehingga benih tanaman kopi sering mati setelah ditanam.

Permasalahan lainnya dalam pengembangan kopi adalah masih adanya petani kopi yang memanennya dalam keadaan kopi belum waktu (petik merah) sehingga mutu dan harga kopi tidak tinggi. Penyebabnya adalah ketakutan kopi yang dibudidaya dicuri hasil panennya sedangkan kopi belum waktunya dipanen.

Untuk saat ini kopi yang dihasilkan di Kabupaten Probolinggo telah dikembangkan pemasaran dengan beberapa cara, diantaranya adalah kopi organik, kopi dalam kemasan yang modren, kopi racik.Kopi di Kabupaten Probolinggo walaupun sangat luas budidaya namun brand image kurang kuat sehingga sering kopi Probolinggo dipasarkan dengan brand image daerah lain.

## 3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

### a. Gambaran Pelayanan PD

Faktor Internal

a. Kekuatan

1) Kabupaten Probolinggo merupakan daerah pertanian, dimana kondisi alamnya mendukung penyelenggaraan sektor pertanian. Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km, sedangkan sungai terpendek adalah Ranu Bujel dengan panjang 2 km.

ungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Probolinggo sebagian besar digunakan irigasi disamping untuk industri, air minum dan mandi cuci. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun. Pada saat musim kemarau, sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih tergenang terus sepanjang tahun.

Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m. Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar, sebagian untuk kebutuhan air minum dan sebagian besar lainnya diperuntukkan **irigasi**, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami kekeringan. Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah< 60 m.

beberapa sungai pada waktu kemarau tidak bisa lagi memberikan air irigasi menyebabkan kelompok-kelompok tani berupaya untuk **menambah air irigasi** dengan menggunakan membangun *sumur irigasi air dangkal*, *menengah*, dan *dalam*. Pembangunan lebih banyak sebagai upaya untuk meningkatkan **Indeks Penanaman (IP).** Selain itu terhadap sungai-sungai kecil juga dibangunkan beberapa **dam parit**, sehingga dapat menaikkan air irigasi ke lahan-lahan pertanian. Pembangunan embung juga diupayakan dengan memanfaatkan sumber-sumber air agar tidak hilang

begitu, diharapkan dengan penampungan air hujan atau mata air yang kecil-kecil bisa digunakan untuk mengairi lahan pertanian yang ada.

Sedangkan untuk pemanfaatan keberadaan ranu-ranu yang ada bisa digunakan **sistem pipanisasi**. Dengan cara menaikkan air ranu dengan menaikkan dan menyalurkan air ranu kepada lahan-lahan pertanian.

Sebagian Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayur sayuran seperti di sekitar pegunungan Tengger yang mempunyai ketinggian antara 750-2500 m di atas permukaan laut. Sedangkan tanah yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki pegunungan Argopuro dan berketinggian antara 150-750 m di atas permukaan laut sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti durian, alpukat dan buah-buahan lainnya.

Di Probolinggo selain musim kemarau dan penghujan tersebut terdapat musim pancaroba, di mana biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang biasa disebut **Angin Gending** yang mana ini memberikan dukungan bagi tanaman hortikultura (bawang merah, mangga).

b. Kelemahan
   1) Kepemilikan/**pengelolaan** lahan pertanian mayoritas dengan luasan kecil/gurem (>70%)
   2) **Kelembagaan** petani masih belum mendukung kinerja petani secara optimal

3) **Belum ada kesiapan yang memadai** menghadapi kecepatan perubahan akibat mudahnya **akses informasi dan mobilitas komoditas** antar daerah
4) **Ketergantungan terhadap air hujan** dalam budidaya masih sangat tinggi bagi mayoritas petani, sehingga pilihan dan penerapan program menjadi terbatas.
5) Kualitas **Sumber Daya Manusia** masih rendah. Tentunya hal tersebut menjadikan sektor pertanian menjadi tidak efisien. Persoalannya adalah banyak tenaga kerja dibidang pertanian adalah **penduduk yang idle** (*tidak terlatih*), hanya terdapat **23%** tenaga kerja yang ada merupakan tenaga kerja yang terlatih. Hanya bidang pertanianlah yang dapat menampung **77 %** penduduk yang idle ini. Akibatnya kinerja bidang pertanian di Kabupaten Probolinggo tidak begitu memuaskan karena harus menanggung beban yang begitu besar.
6) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) utamanya terkait tuntutan kualitas dalam manajemen pengelolaan peternakan;
7) Masih terbatasnya wawasan dari masyarakat peternak dalam hal manajemen dan metode pengelolaan ternak yang baik dan benar;
8) Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai masih terbatas;
9) Keterbatasan ketersediaan bibit ternak berkualitas;
10) Cara Pemeliharaan ternak masih secara tradisional/semi intensif.

**Faktor Eksternal**

a. Peluang

1) Permintaan komoditi pertanian **cenderung naik**, dan tingkat harga komoditi akan lebih tinggi lagi
2) Pembangunan di desa yang fokus sektor pertanian mendapatkan dana yang cukup besar.
3) **Sistem informasi** sudah dapat diakses dimana saja dengan mudah sehingga memudahkan semua pihak dalam berinteraksi
4) Dinamika/perkembangan yang sangat pesat terkait teknologi pengolahan pangan, termasuk di dalamnya produk-produk asal hewan;
5) Perlunya segera disusun perangkat lunak kebijakan mulai dari pusat sampai dengan daerah (permentan/perda/perbup) terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Tantangan

1) Produksi, produktivitas, dan mutu komoditas pertanian **cenderung stagnan;**
2) **Perundang-undangan** tentang pertanian belum diterapkan secara optimal;
3) **Penerapan alat mesin pertanian** belum optimal,beberapa tahun yang lampau sudah ada alat mesin yang dibantukan oleh pemerintah namun sebagian penggunaan belum optimal (malahan mangkrak) karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
4) Prasarana dan Sarana **semakin terbatas** bagi peningkatan produksi.Utamanya masalah air dimana sektor lainnya juga meningkat kebutuhannya, kualitas lahan pertanian mengalami penurunan (walaupun penggunaan pupuk organik sudah diterapkan kepada para petani namun

kandungan tanah juga diperlukan dan perlu ada informasi yang lebih detail dan akurat lagi bagi petani).

5) **Kondisi iklim / alam** yang sulit untuk diprediksi
6) Belum **ada logistik yang mendukung hasil pertanian** yang sepadan untuk mengatasi dampak jalan tol
7) **Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian**, walaupun sudah sudah ada arahan luas untuk PLP2B namun ancaman penurunan jumlah produksi akan terus terjadi karena ada lahan-lahan di luar PLP2B yang akan dikonversi menjadi lahan non pertanian.
8) Munculnya wabah penyakit hewan menular (stereotip/zoonosis) akibat kurang tertibnya peredaran lalu lintas ternak;
9) Perkembangan dunia agroindustri/agribisnis, diikuti ketatnya persaingan dalam era pasar bebas;
10) Munculnya wabah penyakit hewan menular (stereotip/zoonosis) akibat kurang tertibnya peredaran lalu lintas ternak;
11) Dinamika/ perkembangan yang sangat pesat terkait teknologi pengolahan pangan, termasuk di dalamnya produk-produk asal hewan;
12) Perkembangan dunia agroindustri /agribisnis, diikuti ketatnya persaingan dalam era pasar bebas;
13) Perlunya segera disusun perangkat lunak kebijakan mulai dari pusat sampai dengan daerah (permentan/perda/perbup) terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**b. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029**

Berdasarkan isu-isu strategis yang berasal dari kondisi internal (permasalahan pembangunan daerah) maupun eksternal (isu strategis internasional, nasional, regional/provinsi Jawa Timur) Kabupaten Probolinggo, maka dapat dirumuskan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan urusan pertanian sebagai berikut:

1. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin. Berbagai upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas dan terjangkau, penyediaan program perlindungan social yang adaptif, serta pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan keterampilan, akses modal, dan fasilitasi lapangan kerja.
2. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi disparitas antar wilayah, pemeliharaan infrastruktur secara berkala, penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan aman bencana, serta

penerapan teknologi ramah lingkungan dan inovasi digital dalam pengelolaan sarana prasarana;

3. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya alam melalui optimalisasi aktivitas ekonomi hijau dan biru berbasis sumberdaya lokal Kabupaten Probolinggo. Isu belum optimalnya mitigasi dan penanganan pencemaran lingkungan maupun degradasi ekosistem lainnya, termasuk pengelolaan sampah serta sumber daya air, menjadi strategis untuk diselesaikan lima tahun mendatang, sebagaimana direkomendasikan oleh KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;

**c. Isu Strategis Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur**

Dokumen pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo adalah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang menjabarkan visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2025-2030. Isu strategis, visi, dan misi RPJMD Kabupaten Probolinggo harus selaras dengan isu strategis, visi dan misi dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Arah kebijakan maupun program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 pun harus selaras, diacu, dan didukung oleh arah kebijakan maupun program prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029.

Adapun RPJMD Provinsi Jawa Timur yang mengakomodir isu-isu strategis pembangunan pada periode 2025-2029 yang relevan dengan urusan Pertanian, yaitu:

1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah, meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar. Pemerataan ekonomi, dibutuhkan percepatan keseimbangan Pembangunan antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.
2. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Untuk menjaga kedaulatan pangan Jawa Timur dan mendukung swasembada pangan nasional ke depan, perlu dilakukan upaya regenerasi petani sebagai produsen komoditas pangan pertanian.

Untuk menjawab isu-isu strategis di atas, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur memiliki Visi "**Bersama Jawa Timur Meju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi ini dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 yang disebut **Nawa Bhakti Satya** dan sekaligus menjadi program prioritas Jawa Timur, dalam hal ini Urusan Pertanian masuk pada misi 4 Jatim Agro yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan.

Sementara itu, arah kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 yang melibatkan Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu lokasinya adalah

Pada pengembangan kawasan Swasembada pangan, air, dan energi di Tapal Kuda.

**d. Isu Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Berdasarkan Arahan rencana pengembangan dari berbagai dokumen perencanaan Kabupaten Probolinggo, khususnya indikasi program yang dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029 dapat menjadi acuan kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Probolinggo.

- Kebijakan kewilayahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang relevan dengan urusan pertanian yaitu Pengendalian alih guna lahan ruang hijau.
- Kebijakan kewilayahan Masterplan Drainase yang relevan dengan urusan pertanian yaitu Penggunaan alur saluran /sungai yang sudah ada dan Mengkonversi saluran irigasi menjadi saluran drainase bila sudah tidak ada lahan sawah yang harus diairi, dengan persetujuan pihak terkait

**e. Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 2025-2029**

isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 yang relevan dengan urusan pertanian, yaitu:

1. Permasalahan pemerataan pembangunan diatasi dengan pengembangan pedesaan dan sentra produksi pertanian untuk mendorong pengembangan agropolitan dan minapolitan terutama di bagian Barat dan Timur Kabupaten untuk terciptanya pemerataan pembangunan;
2. Guna mendukung sistem agropolitan di Probolinggo maka diperlukan perbaikan dan konservasi irigasi dimana saat ini jaringan Irigasi mengalami kerusakan antara 30% – 45%,

baik pada saluran irigasinya maupun pada bangunan irigasinya;

3. Adanya konversi hutan lindung menjadi hutan produksi dan lahan pertanian khususnya hortikultura serta perlu peningkatan pengendalian konversi kawasan hutan lindung untuk mempertahankan kawasan resapan tinggi serta pencegahan erosi dan banjir;
4. Masih terdapat konversi kawasan pertanian ber irigasi teknis menjadi kawasan permukiman dan berbagai kegiatan lainnya sehingga perlu pembatasan dan penetapan lahan pertanian berkelanjutan;
5. Pengembangan perkebunan dan hortikultura sebagai potensi unggulan Kabupaten Probolinggo;

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan lsu Strategis PD

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Potensi Sub Sektor Tanaman Pangan, Sub Sektor Tanaman Hortikultura, Sub Sektor Tanaman Perkebunan dan Sub Sektor Peternakan | 1. Produktivitas semakin sulit mengalami kenaikan,<br>2. Luas lahan semakin berkurang,<br>3. Ketersediaan pupuk,<br>4. Kepastian pasar yang setiap saat bisa berubah,<br>5. Pembiayaan dan Akses Permodalan,<br>6. Kelembagaan,<br>7. Perubahan Iklim dan wabah penyakit. | 1. Permasalahan pemerataan pembangunan diatasi dengan pengembangan pedesaan dan sentra produksi pertanian untuk mendorong pengembangan agropolitan dan minapolitan terutama di bagian Barat dan Timur Kabupaten untuk terciptanya pemerataan pembangunan<br>2. Guna mendukung sistem agropolitan di Probolinggo maka diperlukan perbaikan dan konservasi irigasi dimana saat ini jaringan Irigasi mengalami kerusakan antara 30% – 45%, baik pada saluran irigasinya | 1. Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca.<br>2. Isu globalisasi ekonomi dengan meningkatnya proteksionisme yang mempengaruhi perdagangan dan investasi.<br>3. Disrupsi teknologi | Pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja yang berkualitas dan Swasembada pangan | 1. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani.<br>2. Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | 1. Alih Fungsi Lahan Pertanian Produktif,<br>2. Ketersediaan Air untuk Pertanian,<br>3. Produktivitas Pertanian yang Belum Optimal,<br>4. Perubahan Iklim dan Bencana Alam,<br>5. Fluktuasi Harga,<br>6. Wabah Penyakit dan Populasi Ternak,<br>7. Kelembagaan dan Regenerasi Petani,<br>8. Inovasi dan Teknologi Pertanian,<br>9. Peningkatan Nilai Tambah dan Hilirisasi,<br>10. Kesejahteraan dan Daya Saing Petani |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | maupun pada bangunan irigasinya<br>3. Adanya konversi hutan lindung menjadi hutan produksi dan lahan pertanian khususnya hortikultura serta perlu peningkatan pengendalian konversi kawasan hutan lindung untuk mempertahankan kawasan resapan tinggi serta pencegahan erosi dan banjir<br>4. Masih terdapat konversi kawasan pertanian ber irigasi teknis menjadi kawasan permukiman dan berbagai kegiatan lainnya sehingga perlu pembatasan dan penetapan lahan pertanian berkelanjutan | informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan. | | | |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Misi RPJMD yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian termasuk dalam Misi ke-2 yakni **SAE EKONOMI – Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan.**

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian dalam waktu 5 (tahun) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah | Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah | | Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) | 1,85 | 2,11 | 2,38 | 2,64 | 2,91 | 3,17 | |
| | | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor usaha berbasis pertanian | Persentase peningkatan produksi sub sektor tanaman pangan (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Persentase peningkatan produksi sub sektor hortikultura (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Persentase peningkatan produksi sub sektor perkebunan (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Persentase peningkatan produksi dan populasi sub sektor peternakan (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |

**Gambar 3.2.2 Cascading Dinas Pertanian**

**Kabupaten Probolinggo**

Pemerintah
Kabupaten Probolinggo

# ARSITEKTUR CASCADING DINAS PERTANIAN

| | | |
|---|---|---|
| TUJUAN | Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah | |
| INDIKATOR TUJUAN | Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) | |
| SASARAN | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor usaha berbasis pertanian | |
| INDIKATOR SASARAN | 1. Persentase peningkatan produksi sub sektor tanaman pangan<br>2. Persentase peningkatan produksi sub sektor hortikultura<br>3. Persentase peningkatan produksi sub sektor perkebunan<br>4. Persentase peningkatan populasi dan produksi sub sektor peternakan | |
| PROGRAM | Program Perizinan Usaha Pertanian | Program Penyuluhan Pertanian |
| INDIKATOR PROGRAM | 1. persentase rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang diawasi pelaksanaannya<br>2. Persentase legalitas izin usaha peternakan yang diawasi | Persentase kelompok tani yang nilai skor/kelas kapasitas kelembagaanya naik |

Pemerintah
Kabupaten Probolinggo

| | | |
|---|---|---|
| TUJUAN | Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah | IMPACT |
| INDIKATOR TUJUAN | Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) | |
| SASARAN | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | ULTIMATE OUTCOME |
| INDIKATOR SASARAN | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | |
| PROGRAM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | INTERMEDIATE OUTCOME |
| INDIKATOR PROGRAM | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | |

**b. Uraian Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Tahunan**

Dalam mensukseskan Pembangunan Kabupaten Probolinggo selama 5 tahun kedepan, Dinas Pertanian memiliki tujuan meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah artinya tujuan ini diarahkan untuk mendorong pemanfaatan potensi unggulan daerah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Fokusnya adalah memperkuat basis produksi lokal, meningkatkan nilai tambah, dan menjaga keberlanjutan usaha masyarakat berbasis sumber daya alam, dengan Indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%). Target meningkat dari 1,85% pada tahun 2025, menjadi 2,11% di 2026, 2,38% di 2027, 2,64% di 2028, 2,91% di 2029, dan mencapai 3,17% pada tahun 2030. Adapun sasaran utama Pembangunan Dinas pertanian Adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Usaha Berbasis Pertanian dengan Indikator 1. Persentase peningkatan produksi subsektor tanaman pangan (%) target konsisten sebesar 3% setiap tahun dari 2025 hingga 2030, Indikator 2. Persentase peningkatan produksi subsektor hortikultura (%) target 3% per tahun dari 2025 sampai 2030, Indikator 3. Persentase peningkatan produksi subsektor perkebunan (%) target: 3% per tahun dari 2025 hingga 2030, Indikator 4. Persentase peningkatan produksi dan populasi subsektor peternakan (%) target konsisten sebesar 1% per tahun dari 2025 hingga 2030. Sedangkan sasaran kedua Adalah Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah Indikator Persentase kenaikan LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (%) target 5% pada tahun 2025, kemudian stabil di 1,5% per tahun dari 2026 sampai 2030.

**c. Uraian Definisi Operasional serta Formula Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran**

Indikator tujuan Dinas Pertaian adalah Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) dengan Definisi Operasional yaitu Laju pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan dengan formula sbb:

$$\textbf{Pertumbuhan PDRB Sektor} = (PDRB_{t} - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1} \times 100\%$$

Indikator sasaran Dinas Pertanian tahun 2025-2029

1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%), definisi operasionalnya persentase kenaikan produksi hasil tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, dll.) yang dihasilkan oleh petani dalam satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya dengan formula sbb:

   $$\textbf{Peningktn Prod TP} = (Produksi_{t} - Produksi_{t-1}) / Produksi_{t-1} \times 100\%$$

2. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura (%), definisi operasional persentase kenaikan produksi hortikultura (buah, sayuran, tanaman hias, tanaman obat) yang dihasilkan dalam satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya dengan formula sbb:

   $$\textbf{Pgktn Prod Horti} = (Produksi_{t} - Produksi_{t-1}) / Produksi_{t-1} \times 100\%$$

3. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%), definisi operasional persentase kenaikan produksi komoditas perkebunan (kopi, kelapa, karet, kakao, dll.) yang diperoleh dalam satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya dengan formula sbb:

   **Pgktn Prod Prbunan=(Produksi$_t$−Produksi$_{t-1}$)/Produksi$_{t-1}$×100%**

4. Persentase peningkatan produksi dan populasi peternakan (%), definisi operasional persentase kenaikan hasil produksi peternakan (daging, telur, susu) dan/atau jumlah populasi ternak dibandingkan tahun sebelumnya dengan formula sbb:

   **Peningkatan Produksi/Populasi Peternakan=(Produksi/ Populasi$_t$−Produksi/Populasi$_{t-1}$)/Produksi/Populasi$_{t-1}$×100%**

5. Persentase kenaikan LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (%), definisi operasional persentase peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (LHE AKIP) perangkat daerah yang diberikan oleh inspektorat daerah dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, dengan formula sbb:

   **Peningkatan LHE AKIP=(Nilai LHE$_t$−Nilai LHE$_{t-1}$)/Nilai LHE$_{t-1}$ ×100%**

## 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**a. Penentuan Strategi**

Formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo.

Dinas Pertanian memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Arah Kebijakan**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VISI :** | **Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing)** | | |
| **MISI 2 :** | Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan | | |
| **Tujuan 2** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan | Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah | Penguatan basis produksi pertanian berdaya saing | Fokus pada pengembangan komoditas unggulan daerah sesuai potensi lokal |
| | | Pengembangan hilirisasi dan nilai tambah | Pengembangan agroindustri, produk olahan, dan peningkatan nilai tambah pertanian |
| | | Pemberdayaan petani dan kelembagaan ekonomi rakyat | Penguatan kapasitas kelembagaan petani, akses pembiayaan, dan pemberdayaan kelompok tani/koperasi |
| | | Penguatan akses pasar dan kemitraan | Fasilitasi akses pasar lokal, regional, ekspor; kemitraan dengan swasta dan digital market |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Penerapan pertanian berkelanjutan | Implementasi pertanian ramah lingkungan, adaptasi perubahan iklim, asuransi pertanian, konservasi sumber daya |
| | | Modernisasi pertanian | Penerapan teknologi tepat guna, digital farming, mekanisasi, serta riset dan inovasi pertanian |
| | | Kolaborasi multipihak | Sinergi pemerintah daerah, swasta, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat |
| | | Pertanian inklusif dan berkeadilan | Keterlibatan petani kecil, perempuan, dan pemuda tani dalam pembangunan pertanian berkelanjutan |
| | | Penguatan produksi dan produktivitas ternak | Peningkatan populasi dan produktivitas ternak unggulan melalui program pembibitan, inseminasi buatan, dan perbaikan pakan |
| | | Pengembangan hilirisasi dan nilai tambah produk peternakan | Dukungan industri olahan daging, susu, telur, serta pengembangan rantai nilai produk peternakan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Peningkatan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal ternak | Program vaksinasi, pengendalian penyakit zoonosis, peningkatan layanan kesehatan hewan, dan jaminan mutu produk asal ternak |
| | | Pemberdayaan peternak dan kelembagaan ekonomi | Penguatan kapasitas kelompok peternak, koperasi peternakan, serta akses permodalan dan pembiayaan inklusif |
| | | Penguatan akses pasar dan kemitraan usaha | Pengembangan jaringan pemasaran ternak dan produk olahan, kemitraan dengan swasta, serta fasilitasi perdagangan digital |
| | | Pengembangan padang penggembalaan dan pakan lokal | Optimalisasi sumber daya lokal untuk pakan, pengembangan hijauan makanan ternak (HMT), dan teknologi pakan alternatif |
| | | Modernisasi usaha peternakan | Penerapan teknologi budidaya modern, sistem informasi peternakan, serta pemanfaatan digital farming |
| | | Kolaborasi multipihak | Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam pengembangan subsektor peternakan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Peternakan berkelanjutan dan inklusif | Pengembangan usaha peternakan ramah lingkungan, keterlibatan peternak kecil, perempuan, dan pemuda dalam usaha peternakan |

**b. Penahapan Pembangunan Pertanian**

Pembangunan sektor pertanian memerlukan arah yang jelas, terukur, dan berkesinambungan. Mengingat peran strategis pertanian sebagai penopang ekonomi daerah sekaligus sumber penghidupan mayoritas masyarakat, maka penyusunan tahapan pembangunan menjadi penting agar setiap langkah dapat saling mendukung dan menguatkan.

Penahapan pembangunan dirancang untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan potensi unggulan daerah secara bertahap. Diawali dengan penguatan fondasi berupa infrastruktur dasar dan sarana produksi, dilanjutkan dengan penerapan teknologi modern dan penguatan kelembagaan, hingga akhirnya mendorong transformasi pertanian menjadi sektor agribisnis yang berdaya saing, adaptif, dan berkelanjutan.

Setiap tahap memiliki fokus yang spesifik namun saling terkait. Fondasi yang kuat pada tahap awal akan menjadi landasan bagi pemantapan sistem agribisnis pada tahap berikutnya. Puncaknya, pertanian daerah diharapkan mampu berkembang sebagai sistem yang modern, ramah lingkungan, berbasis potensi unggulan lokal, serta mampu memperluas kemitraan strategis untuk kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, berikut ini tabel penahapan selama 5 tahun :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

| TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | TAHAP V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Penguatan infrastruktur dasar pertanian (irigasi, jalan usaha tani, sarana pasca panen) | Peningkatan pemerataan sarana produksi pertanian, penguatan kelompok tani, dan penerapan teknologi pertanian modern | Pemantapan sistem agribisnis unggulan, integrasi hulu-hilir pertanian, digitalisasi layanan pertanian, serta tata kelola penyuluhan yang transparan | Penguatan usaha agribisnis rakyat menjadi usaha komersial berdaya saing, perluasan akses pasar, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani | Optimalisasi pertanian berkelanjutan berbasis potensi unggulan daerah, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta perluasan kemitraan strategis |

**c. Lokus Renstra PD**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang terarah, terpadu, dan berbasis potensi wilayah, Dinas Pertanian menetapkan lokus pembangunan strategis dalam periode Renstra 2025–2029. Lokus ini dipilih berdasarkan keunggulan komparatif daerah, kebutuhan penguatan kapasitas produksi, serta peluang pengembangan kawasan berdaya saing.

Pertama, Kawasan Agropolitan menjadi fokus utama dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan. Kawasan ini diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dengan dukungan infrastruktur produksi, distribusi, dan pengolahan hasil yang terintegrasi, sehingga mampu menjadi simpul pemasaran regional.

Kedua, Kawasan Peternakan difokuskan sebagai basis produksi ternak rakyat yang berkelanjutan dan modern. Pengembangan diarahkan pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak, penguatan kelembagaan peternak, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Kawasan ini diharapkan menjadi pusat produksi daging, susu, telor dan hasil peternakan lainnya yang memenuhi kebutuhan daerah dan memperluas akses pasar.

Ketiga, Kawasan di sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dimanfaatkan sebagai lokus pembangunan pertanian ramah lingkungan. Mengingat kawasan ini memiliki karakter ekologis yang sensitif sekaligus potensi wisata alam yang tinggi, pendekatan yang digunakan adalah pertanian berkelanjutan berbasis konservasi, agroforestry, dan pengembangan ekowisata pertanian. Dengan demikian, kawasan ini tidak hanya menjaga

kelestarian lingkungan tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Keempat, Kawasan Pembangunan DAK Fisik dijadikan prioritas intervensi untuk memperkuat infrastruktur pertanian. Dukungan DAK Fisik diarahkan bagi pembangunan irigasi, jalan usaha tani, sarana pasca panen, dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi pondasi bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Melalui lokus pembangunan tersebut, Renstra Dinas Pertanian 2025–2029 tidak hanya menekankan pada peningkatan produksi semata, tetapi juga pada integrasi wilayah, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan daya saing petani. Lokus ini diharapkan menjadi motor penggerak transformasi pertanian daerah menuju sistem agribisnis yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

**d. Arah Kebijakan Renstra PD**

Perumusan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian 2025–2029 didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab tantangan pembangunan sektor pertanian sekaligus memanfaatkan potensi unggulan daerah. Pertanian memiliki peran penting sebagai penyokong ketahanan pangan, sumber penghidupan masyarakat, serta motor penggerak perekonomian daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dirumuskan harus selaras dengan visi pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta aspirasi masyarakat tani.

Proses perumusan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan kondisi aktual sektor pertanian, meliputi tingkat produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia pertanian, serta dinamika pasar hasil pertanian. Selain itu, isu strategis seperti perubahan iklim, degradasi lahan, keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya nilai tambah, serta

lemahnya kelembagaan petani juga menjadi bahan pertimbangan utama.

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra PD

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | | Perluasan akses pasar komoditas unggulan daerah | Fasilitasi akses pasar lokal, regional, ekspor, kemitraan dengan swasta dan digital market | |
| 2 | | Pengembangan sektor industri bagi komoditas unggulan daerah dalam rangka hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah | Pengembangan agroindustri, produk olahan, dan peningkatan nilai tambah pertanian | |
| 3 | | Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) | Penerapan teknologi tepat guna, digital farming, mekanisasi, serta riset dan inovasi pertanian | |
| 4 | | Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global | Fokus pada pengembangan komoditas unggulan daerah sesuai potensi lokal | |

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANIAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo. Program dan kegiatan Dinas Pertanian tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo.

## a. Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan indikator kinerja

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian 2025–2029 disusun untuk memastikan keterhubungan antara tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah maupun nasional. Setiap kegiatan diarahkan menjawab isu

strategis sektor pertanian seperti keterbatasan sarana prasarana, rendahnya produktivitas, akses pasar, dan adopsi teknologi.

Untuk menjamin pencapaian sasaran, setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan sesuai prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Dengan demikian, pelaksanaan Renstra tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani. Adapun matrik program, kegiatan, sub kegiatan dan indicator kinerja sbb:

## 4.1 Matrik program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKBGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| **Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah** | **Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah** | | | | **Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)** | | |
| | | **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor usaha berbasis pertanian** | | | **Persentase peningkatan produksi sub sektor tanaman pangan (%)** | | |
| | | | | | **Persentase peningkatan produksi sub sektor hortikultura (%)** | | |
| | | | | | **Persentase peningkatan produksi sub sektor perkebunan (%)** | | |
| | | | | | **Persentase peningkatan produksi dan populasi sub sektor peternakan (%)** | | |
| | | | **1. Sarana Pertanian yang aktif digunakan kelompok tani<br>2. Sarana Peternakan yang aktif digunakan kelompok tani ternak** | | **1. Persentase ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan<br>2. Persentase ketersediaan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | |
| | | | | **100%** | **Persentase sarana pertanian yang diawasi** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | |
| | | | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | |
| | | | | **4%** | **1. Persentase SDG Tanaman yang dikelola**<br>**2. Persentase sarana terkait SDG Hewan yang dikelola** | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | |
| | | | | | | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | |
| | | | | | | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | |
| | | | | | | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | |
| | | | | **Bibit ternak dan pakan ternak kualitas unggul** | **Persentase peningkatan mutu dan peredaran bibit ternak dan pakan ternak** | **Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | | | | | | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | |
| | | | | | | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | |
| | | | | **Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer** | **Persentase Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer** | **Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer** | |
| | | | | | | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tersedianya Bibit ternak dan hijauan pakan ternak** | **Persentase ketersediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak** | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | |
| | | | | | | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | |
| | | | | | | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | |
| | | | **1. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana Pertanian**<br>**2. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana Peternakan** | | **1. Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian**<br>**2. Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | |
| | | | | **Prasarana pertanian yang dikembangkan** | **Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan** | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | |
| | | | | | | Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | |
| | | | | | | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan | |
| | | | | | | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | |
| | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | |
| | | | | **1. Prasarana pertanian yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara**<br>**2. Prasarana peternakan yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara** | **1. Persentase prasarana pertanian yang dibangun, dipelihara dan di rehabilitasi**<br>**2. Persentase prasarana peternakan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara** | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | |
| | | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | |
| | | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | |
| | | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | |
| | | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan | |
| | | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | |
| | | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
| | | | **1. Menurunya jumlah kasus penyakit hewan menular<br>2. Meningkatnya Produk Hewan yang ASUH** | | **1. Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular<br>2. Persentase peningkatan produk hewan yang ASUH (daging,susu,telur)** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | |
| | | | | **15,39%** | **persentase hewan ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan** | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | | | | | | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | **27,80%** | **Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan Produk Hewan dari daerah Kabupaten/Kota** | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | |
| | | | | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | |
| | | | | **100%** | **1. Persentase pelayanan jasa laboratorium yang dikelola**<br>**2. Persentase pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola** | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | | | | | | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | |
| | | | | | | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | |
| | | | | **10%** | **persentase unit usaha hewan dan produk hewan yang mendapatkan pendampingan kesehatan masyarakat veteriner** | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | |
| | | | | | | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | |
| | | | | | | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | |
| | | | | **100%** | **Persentase penerapan dan pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan pada unit usaha** | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan** | |
| | | | | | | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | |
| | | | **Produksi Pertanian yang meningkat** | | **Persentase Luas Wilayah yang Terkendali Bencana Pertaniannya** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | |
| | | | | **95%** | **persentase luasan lahan pertanian terdampak bencana yang tertangani** | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | |
| | | | | | | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | |
| | | | | | | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | |
| | | | | | | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | |
| | | | | | | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan | |
| | | | **1. Meningkatnya jumlah pelaku usaha pertanian yang memiliki izin usaha dan pertumbuhan ekonomi**<br>**2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha peternakan yang memiliki legalitas izin usaha** | | **1. Persentase rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang diawasi pelaksanaannya**<br>**2. Persentase legalitas izin usaha peternakan yang diawasi** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | |
| | | | | **100%** | **Persentase rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan** | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | | | | | | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | |
| | | | | | | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | |
| | | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **83,30%** | **persentase jumlah dokumen teknis izin usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan** | **Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan** | |
| | | | | | | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | |
| | | | | | | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | |
| | | | | | | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan | |
| | | | | | | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan | |
| | | | SDM Petani yang meningkat | | **Persentase kelompok tani yang nilai skor/kelas kapasitas kelembagaanya naik** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | |
| | | | | **100%** | **Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan pertanian** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | |
| | | | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | |
| | | | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kecamatan dan Desa | |
| | | | | | | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | |
| | | | | | | Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani | |
| | | | | | | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | |
| | | | | | | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | |
| | | **Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Dae** | | | **Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%)** | | |
| | | | **Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD** | | **Nilai LHE AKIP PD (Nilai)** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA** | |
| | | | | **24 Dokumen** | **Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | |
| | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | **47 Dokumen** | **Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | |
| | | | | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **56 Dokumen** | **Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | |
| | | | | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | |
| | | | | | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | **16 Dokumen** | **Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | |
| | | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | |
| | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | |
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |
| | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| | | | | **100%** | **Persentase penyediaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengadaan Mebel | |
| | | | | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | |
| | | | | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | **23 Paket** | **Prosentase pemenuhan administrasi umum PD** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |
| | | | | **48 Laporan** | **Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **35 BMD** | **Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | | | | |

**b. Uraian Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator Program/ Kegiatan/Subkegiatan**

Untuk memastikan setiap program pembangunan di bidang pertanian dan peternakan dapat dipantau kinerjanya secara terukur, diperlukan indikator yang jelas, definisi operasional yang tepat, serta formula perhitungan yang baku. Definisi operasional berfungsi memberikan batasan teknis mengenai apa yang dimaksud dalam setiap indikator, sementara formula perhitungan menjelaskan cara memperoleh angka capaian yang objektif.

Dengan adanya kejelasan definisi dan formula, evaluasi kinerja program dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan pertanian dan peternakan di Kabupaten Probolinggo.

**Berikut definisi operasional dan formula perhitungan pada program Dinas Pertanian tahun 2025-2029 :**

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   - Indikator 1 Persentase ketersediaan sarana pertanian sesuai peruntukan
     - *Definisi operasional*: Persentase sarana pertanian yang sesuai peruntukan dan aktif digunakan pada tahun berjalan.
     - *Formula*:
       Jumlah sarana pertanian aktif digunakan/Jumlah seluruh sarana pertanian tercatat×100%
   - Indikator 2 Persentase ketersediaan sarana peternakan
     - *Definisi operasional*: Persentase sarana peternakan yang sesuai peruntukan dan aktif digunakan pada tahun berjalan.
     - *Formula*:
       Jumlah sarana peternakan aktif digunakan/Jumlah seluruh sarana peternakan tercatat×100%

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   - Indikator 1: Persentase peningkatan prasarana pertanian
     - *Definisi operasional*: Prasarana pertanian meliputi jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani, irigasi air tanah/sumur pompa, serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
     - *Formula*:
       Jumlah prasarana pertanian tahun N/Jumlah prasarana pertanian tersedia×100%
   - Indikator 2: Persentase peningkatan prasarana peternakan
     - *Definisi operasional*: Prasarana peternakan yang dimaksud meliputi Puskeswan, Rumah Potong Hewan (RPH), dan Laboratorium.
     - *Formula*:
       Jumlah prasarana peternakan tahun NJumlah prasaran a peternakan tersedia×100%

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   - Indikator 1: Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular
     - *Definisi operasional*: Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular di wilayah kabupaten pada tahun berjalan.
     - *Formula*:
       (Jumlah kasus tahun t−Jumlah kasus tahun (t-1)) /Jumlah kasus tahun (t-1)×100%
   - Indikator 2: Persentase peningkatan produk hewan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)
     - *Definisi operasional*: Produk hewan berupa daging, susu, dan telur yang memenuhi standar NKV, halal, dan/atau PIRT.
     - *Formula*:
       Jumlah produk hewan ASUH (daging RPH + susu NKV + telur NKV)/Jumlah total produk hewan (RPH + non RPH, NKV + non NKV)×100%

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Indikator: Persentase luas wilayah yang terkendali bencana pertanian
  - *Definisi operasional*: Persentase luas wilayah pertanian yang dapat dikendalikan dari ancaman bencana (hama, kekeringan, banjir, dll.) pada tahun berjalan.
  - *Formula*: (tidak tertulis eksplisit di tabel, bisa diturunkan sebagai)
    Luas wilayah terkendali bencana/Total luas wilayah rawan bencana×100%

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

- Indikator 1: Persentase rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang diawasi pelaksanaannya
  - *Definisi operasional*: Rekomendasi izin usaha pertanian termasuk rekomendasi BBM solar untuk alat pertanian.
  - *Formula*:
    Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian tahun N/
    Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian yang tersedia× 100%
- Indikator 2: Persentase legalitas izin usaha peternakan yang diawasi
  - *Definisi operasional*: Pengawasan dokumen izin usaha peternakan, termasuk rekomendasi teknis, fasilitasi penerbitan izin usaha dengan risiko menengah–tinggi maupun rendah.
  - *Formula*:
    Jumlah dokumen izin usaha peternakan tahun N/
    Jumlah  pelaku usaha peternakan×100%

6. Program Penyuluhan Pertanian

- Indikator: Persentase kelompok tani yang naik kelas kapasitas kelembagaannya
  - *Definisi operasional*: Kelompok tani yang berhasil meningkatkan skor atau kelas kapasitas kelembagaannya pada tahun berjalan.
  - *Formula*:
    Jumlah kelompok tani yang naik kelasJumlah total kelo mpok tani×100%

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Indikator: Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah (PD)

- *Definisi operasional*: Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang ditetapkan melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
- *Formula*: Penilaian sesuai metode evaluasi Kementerian PANRB (bukan rasio matematis, melainkan skor evaluatif).

**Uraian Definisi operasional dan formula perhitungan pada kegiatan Dinas Pertanian tahun 2025-2029 :**

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
   - Definisi Operasional: Proporsi sarana pertanian yang berhasil diawasi dibandingkan dengan total sarana pertanian yang ada pada tahun berjalan.
   - Formula:
     Jumlah sarana pertanian yang diawasi tahun n /
     Jumlah sarana pertanian tahun n×100%

2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)

a. SDG Tanaman
   - Definisi Operasional: Persentase varietas atau jenis tanaman yang telah dikelola oleh pemerintah daerah dibandingkan total SDG tanaman yang ada.
   - Formula:
     Jumlah SDG tanaman yang dikelola tahun n /
     Jumlah SDG tanaman yang ada×100%

b. SDG Hewan
   - Definisi Operasional: Persentase sarana terkait sumber daya genetik ternak yang telah dikelola pemerintah daerah dibandingkan jumlah total SDG ternak.
   - Formula:
     Jumlah SDG ternak yang dikelola tahun n /
     Jumlah SDG ternak yang ada×100%

3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak serta Pakan
   - Definisi Operasional: Tingkat peningkatan mutu dan jumlah bibit ternak maupun pakan ternak yang beredar sesuai standar.
   - Formula:
     Jumlah bibit/pakan ternak yang beredar tahun n /
     Jumlah bibit/pakan ternak yg ditingkatkan mutunya×100%

4. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
   - Definisi Operasional: Persentase pengecer obat hewan yang mendapat pengawasan sesuai standar pengendalian.
   - Formula:
     Jumlah pengawasan obat hewan di tingkat pengecer tahun n / Jumlah pengecer obat hewan×100%

5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
   - Definisi Operasional: Tingkat ketersediaan bibit ternak dan hijauan pakan yang diterima oleh kelompok dibandingkan jumlah yang direncanakan untuk diberikan.
   - Formula:
     Jumlah bibit/hijauan pakan yang diterima kelompok tahun n / Jumlah yang akan diberikan×100%

6. Pengembangan Prasarana Pertanian
   - Definisi Operasional: Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan sesuai target.
   - Formula:
     Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan tahun n / Jumlah prasarana pertanian yang akan dikembangkan tahun n x 100%

7. Pembangunan Prasarana Pertanian

a. Prasarana Pertanian
   - Definisi Operasional: Persentase prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara dibanding rencana.
   - Formula:
     Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/rehabilitasi/ pelihara tahun n / Jumlah yang ditargetkan tahun n×100%

b. Prasarana Peternakan
   - Definisi Operasional: Persentase prasarana peternakan yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara sesuai target tahunan.
   - Formula:
     Jumlah prasarana peternakan yang terbangun/rehabilitasi/ pelihara tahun n / Jumlah yang ditargetkan tahun n×100%

8. Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Definisi Operasional: Persentase hewan ternak yang memperoleh pelayanan kesehatan (pengobatan suportif) dari total populasi ternak.
- Formula:
  Jumlah hewan yang mendapat pelayanan kesehatan / Jumlah populasi ternak per komoditas×100%

9. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

- Definisi Operasional: Tingkat pengawasan terhadap hewan dan produk hewan yang keluar masuk daerah.
- Formula:
  Jumlah hewan dan Produk Hewan yang keluar masuk daerah kabupaten/kota tahun n / Jumlah hewan dan Produk Hewan yang keluar masuk daerah kabupaten/kota tahun n-1 x 100%

10. Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner

a. Laboratorium

- Definisi Operasional: Pelayanan pemeriksaan feses dan RBT.
- Formula:
  Jumlah sampel yang dilayani tahun n / Jumlah sampel tahun n×100%

b. Jasa Medik Veteriner

- Definisi Operasional: Pelayanan kesehatan hewan (pengobatan dan pencegahan penyakit hewan).
- Formula:
  Jumlah pasien yang dilayani tahun n / Jumlah pasien yang akan dilayani tahun n×100%

11. Penerapan dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Definisi Operasional: unit usaha hewan dan produk hewan yang mendapatkan pendampingan kesehatan masyarakat veteriner.
- Formula:
  Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang mendapatkan pendampingan kesehatan masyarakat veteriner tahun n / Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang mendapatkan pendampingan kesehatan masyarakat veteriner tahun n-1 x 100%

12. Penerapan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan
- Definisi Operasional: Penerapan dan pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan pada unit usaha.
- Formula:
  Jumlah penerapan dan pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan pada unit usaha tahun n / Jumlah penerapan dan pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan pada unit usaha tahun n-1 x 100%

13. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Definisi Operasional: Persentase luasan lahan pertanian terdampak bencana yang tertangani dibandingkan total lahan terdampak.
- Formula:
  luasan lahan pertanian terdampak bencana yang tertangani tahun n / total lahan terdampak bencana x 100%

14. Penerbitan Izin Usaha Pertanian

a. Izin Usaha Bidang Pertanian
- Definisi Operasional: Rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan.
- Formula:
  Jumlah Rekomendasi izin usaha bidang pertanian tahun N / Jumlah Rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang akan diterbitkan x 100%

b. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak, Pakan, dan Fasilitas Peternakan
- Definisi Operasional: jumlah dokumen teknis izin usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan.
- Formula:
  Jumlah dokumen teknis izin usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan tahun n / Jumlah pengajuan izin usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan tahun n x 100%

15. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- Definisi Operasional: Persentase kelompok tani yang mendapat penyuluhan dibandingkan jumlah kelompok tani yang terdaftar.
- Formula:

kelompok tani yang mendapat penyuluhan tahun n / jumlah kelompok tani yang terdaftar s.d tahun n

16. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
    - Definisi Operasional: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun dan dilaporkan tepat waktu.
    - Formula: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun tahun n

17. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Definisi Operasional: Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan sesuai jadwal.
    - Formula: Jumlah dokumen yang disusun dan dilaporkan tahun n

18. Administrasi Barang Milik Daerah (BMD)
    - Definisi Operasional: Jumlah dokumen administrasi pengelolaan barang milik daerah yang dilaporkan tepat waktu.
    - Formula: Jumlah dokumen administrasi pengelolaan barang milik daerah tahun n.

19. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Definisi Operasional: Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun tepat waktu.
    - Formula: Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n.

20. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
    - Definisi Operasional: Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
    - Formula: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n.

21. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Definisi Operasional: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar.
    - Formula: Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar tahun n/ target pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tahun n

22. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Definisi Operasional: Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai rencana.
    - Formula: Jumlah laporan yang disusun dan disampaikan tahun n.

23. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
    - Definisi Operasional: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik.
    - Formula: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dalam kondisi baik tahun n.

**Uraian Definisi operasional dan formula perhitungan pada subkegiatan Dinas Pertanian tahun 2025-2029 :**

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
   - Definisi Operasional: Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian yang diawasi penggunaannya.
   - Formula: Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian yang diawasi penggunaannya.

2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
   - Definisi Operasional: Jumlah pengguna sarana pendukung pertanian yang didampingi.
   - Formula: Jumlah pengguna sarana pendukung pertanian yang didampingi.

3. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
   - Definisi Operasional: Jumlah SDG Tanaman yang meningkat kualitasnya.
   - Formula: Jumlah SDG Tanaman yang meningkat kualitasnya.

4. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
   - Definisi Operasional: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman.
   - Formula: Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang meningkat kualitasnya.

5. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
   - Definisi Operasional: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
   - Formula: Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dimanfaatkan.

6. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
   - Definisi Operasional: Jumlah laporan pengawasan mutu benih/bibit ternak melalui kegiatan pengukuran ternak yang sesuai dengan SNI.
   - Formula: Jumlah laporan Surat Keterangan Layak Bibit tahun n.

7. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

- Definisi Operasional: Jumlah pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak.
- Formula: Jumlah pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang dilaksanakan tahun n.

8. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

- Definisi Operasional: Pengawasan peredaran obat hewan.
- Formula: Jumlah Pengawasan peredaran obat hewan tahun n.

9. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

- Definisi Operasional: Jumlah bibit ternak yang diterima kelompok tani ternak.
- Formula: Jumlah bibit ternak yang diterima kelompok tani ternak tahun n.

10. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

- Definisi Operasional: Jumlah kelompok yang mendapatkan hibah sarana pengembangan pakan ternak mandiri.
- Formula: Jumlah kelompok yang mendapatkan hibah sarana pengembangan pakan ternak mandiri tahun n.

11. Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan

- Definisi Operasional: Jumlah kelompok tani yang mendapatkan alat pasca panen hasil perkebunan.
- Formula: Jumlah kelompok tani yang mendapatkan alat pasca panen hasil perkebunan tahun n.

12. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan

- Definisi Operasional: Jumlah kelompok tani yang mendapatkan prasarana pasca panen perkebunan.
- Formula: Jumlah kelompok tani yang mendapatkan prasarana pasca panen perkebunan tahun n.

13. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

- Definisi Operasional: Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota.
- Formula: LP2B, KP2B dan LCP2B di Kabupaten/Kota yang dikelola tahun n.

14. Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
- Definisi Operasional: Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota yang disusun.
- Formula: Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota yang disusun tahun n.

15. Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
- Definisi Operasional: Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian yang disusun.
- Formula: Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian yang disusun tahun n.

16. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
- Definisi Operasional: Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.
- Formula: Banyaknya Jumlah koordinasi yang dilaksanakan tahun N.

17. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- Definisi Operasional: Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian melalui penambahan fasilitas prasarana pertanian dengan merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi tersier.
- Formula: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi dan dipelihara tahun n.

18. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Definisi Operasional: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan sebagai penghubung kawasan pertanian ke jalan kolektor.
- Formula: Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan usaha tani tahun n.

19. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya

- Definisi Operasional: Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.
- Formula: Jumlah Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara tahun n.

20. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

- Definisi Operasional: Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara meliputi irigasi air tanah/sumur pompa, bangsal, screen house dll (selain jaringan irigasi dan jalan usaha tani)
- Formula: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara tahun n.

21. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan

- Definisi Operasional: Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan
- Formula: Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi tahun n

22. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan

- Definisi Operasional: Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan
- Formula: Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi tahun n.

23. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Definisi Operasional: Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- Formula: Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara tahun n.

24. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Definisi Operasional: Penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.
- Formula: Jumlah Penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Tahun n.

25. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

- Definisi Operasional: Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM).
- Formula: Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) tahun n.

26. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM

- Definisi Operasional: Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM.
- Formula: Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM tahun n.

27. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

- Definisi Operasional: Jumlah pelayanan pemeriksaan feses dan RBT.
- Formula: Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Tahun berjalan.

28. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

- Definisi Operasional: Jumlah pelayanan kesehatan hewan (pengobatan dan pencegahan penyakit hewan).
- Formula: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Tahun berjalan.

29. Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan

- Definisi Operasional: Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan.
- Formula: Jumlah Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan tahun n.

30. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

- Definisi Operasional: Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan diwilayah kabupaten probolinggo.
- Formula: Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Tahun n.

31. Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

- Definisi Operasional: Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM).
- Formula: Jumlah Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) tahun n.

32. Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha

- Definisi Operasional: Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha.
- Formula: Jumlah unit usaha yang mendapatkan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan Tahun n.

33. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

- Definisi Operasional: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan.
- Formula: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan tahun n.

34. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

- Definisi Operasional: Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani.
- Formula: Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani tahun n.

35. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

- Definisi Operasional: Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- Formula: Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun n.

36. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

- Definisi Operasional: Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- Formula: Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun n.

37. Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan
- Definisi Operasional: Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Formula: Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun n.

38. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
- Definisi Operasional: Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian.
- Formula: Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian tahun n.

39. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
- Definisi Operasional: Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian yang dilaksanakan.
- Formula: Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian tahun n.

40. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
- Definisi Operasional: Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi
- Formula: Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi tahun n.

41. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
- Definisi Operasional: Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.
- Formula: Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan tahun n.

42. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan

- Definisi Operasional: Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi.
- Formula: Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi tahun n.

43. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan

- Definisi Operasional: Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi.
- Formula: Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi tahun n.

44. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan

- Definisi Operasional: Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi.
- Formula: Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi tahun n.

45. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

- Definisi Operasional: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya.
- Formula: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya tahun n.

46. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

- Definisi Operasional: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya.
- Formula: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya tahun n.

47. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

- Definisi Operasional: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
- Formula: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian tahun n.

48. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

- Definisi Operasional: Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk.
- Formula: Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk tahun n.

49. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

- Definisi Operasional: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi
- Formula: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi tahun n.

50. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
- Definisi Operasional: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan terlaksana dalam periode waktu tertentu.
- Formula: Jumlah kelompok tani yang sudah melaksanakan sekolah lapang tahun n.

51. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
- Definisi Operasional: Penerapan Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian kepada petani.
- Formula: Jumlah laporan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian pada tahun n.

52. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Formula: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun n.

53. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- Formula: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

54. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- Formula: Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

55. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- Formula: Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

56. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.
- Formula: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.

57. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.
- Formula: Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.

58. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Definisi Operasional: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Formula: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

59. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Definisi Operasional: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Formula: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

60. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Definisi Operasional: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
- Formula: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

61. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- Formula: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

62. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- Formula: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

63. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
- Formula: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

64. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Definisi Operasional: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- Formula: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

65. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan.
- Formula: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan.

66. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Definisi Operasional: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- Formula: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

67. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- Formula: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

68. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

- Definisi Operasional: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
- Formula: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

69. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

- Definisi Operasional: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
- Formula: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.

70. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Definisi Operasional: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- Formula: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

71. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Definisi Operasional: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- Formula: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

72. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Definisi Operasional: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
- Formula: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.

73. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian.
- Formula: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian.

74. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- Formula: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

75. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Definisi Operasional: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
- Formula: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

76. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Definisi Operasional: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
- Formula: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

77. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Definisi Operasional: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- Formula: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

78. Pengadaan Mebel
- Definisi Operasional: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.
- Formula: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.

79. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Definisi Operasional: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan.
- Formula: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan.

80. Pengadaan Aset Tak Berwujud
- Definisi Operasional: Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan.
- Formula: Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan.

81. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Definisi Operasional: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Formula: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.

82. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Definisi Operasional: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Formula: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

83. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Definisi Operasional: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- Formula: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

84. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Definisi Operasional: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- Formula: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.

85. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan
- Formula: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan.

86. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Definisi Operasional: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Formula: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

87. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Definisi Operasional: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Formula: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

88. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- Formula: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

89. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Definisi Operasional: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Formula: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

90. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Definisi Operasional: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
- Formula: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

91. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Definisi Operasional: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
- Formula: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

92. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Definisi Operasional: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
- Formula: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

93. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Definisi Operasional: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
- Formula: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

94. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Definisi Operasional: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
- Formula: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

95. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Definisi Operasional: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
- Formula: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.

96. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Definisi Operasional: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
- Formula: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

## 4.2 Matrik Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | 48.283.567.408,62 | | 48.868.284.464 | | 49.643.653.531 | | 50.700.264.743 | | 51.931.942.628 | | |
| 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 26.591.464.509,12 | | 26.886.900.000 | | 27.287.600.000 | | 27.844.300.000 | | 28.497.200.000 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 77,45 | 79,02 | 26.591.464.509,12 | 79,81 | 26.886.900.000 | 80,61 | 27.287.600.000 | 81,41 | 27.844.300.000 | 82,23 | 28.497.200.000 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian | |
| 3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 150.000.000 | | 151.666.525 | | 153.926.836 | | 157.067.129 | | 160.750.077 | | |
| 24 Dokumen | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | 4 | 150.000.000 | 4 | 151.666.525 | 4 | 153.926.836 | 4 | 157.067.129 | 4 | 160.750.077 | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 150.000.000 | | 151.666.525 | | 153.926.836 | | 157.067.129 | | 160.750.077 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 | 12 | 150.000.000 | 12 | 151.666.525 | 12 | 153.926.836 | 12 | 157.067.129 | 12 | 160.750.077 | | |
| 3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 3.27.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 22.679.534.711 | | 22.931.508.026 | | 23.273.260.153 | | 23.748.062.772 | | 24.304.913.193 | | |
| 47 Dokumen | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 22.679.534.711 | 12 | 22.931.508.026 | 12 | 23.273.260.153 | 12 | 23.748.062.772 | 12 | 24.304.913.193 | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 210 | 210 | | 210 | | 210 | | 210 | | 210 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 22.411.556.111 | | 22.660.552.140 | | 22.998.266.166 | | 23.467.458.575 | | 24.017.729.320 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 210 | 210 | 22.411.556.111 | 210 | 22.660.552.140 | 210 | 22.998.266.166 | 210 | 23.467.458.575 | 210 | 24.017.729.320 | | |
| 3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 262.023.520 | | 264.934.644 | | 268.883.010 | | 274.368.548 | | 280.802.009 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 262.023.520 | 12 | 264.934.644 | 12 | 268.883.010 | 12 | 274.368.548 | 12 | 280.802.009 | | |
| 3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 3.573.048 | | 3.612.745 | | 3.666.586 | | 3.741.389 | | 3.829.118 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 3.573.048 | 12 | 3.612.745 | 12 | 3.666.586 | 12 | 3.741.389 | 12 | 3.829.118 | | |
| 3.27.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 3.27.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 2.382.032 | | 2.408.497 | | 2.444.391 | | 2.494.260 | | 2.552.746 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | 1 | 2.382.032 | 1 | 2.408.497 | 1 | 2.444.391 | 1 | 2.494.260 | 1 | 2.552.746 | | |
| 3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 2.286.750,72 | | 2.312.157 | | 2.346.615 | | 2.394.489 | | 2.450.636 | | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT** | **INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT** | **BASELINE TAHUN 2024** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |
| | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | | |
| | | | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 56 Dokumen | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 28 | 28 | 2.286.750,72 | 28 | 2.312.157 | 28 | 2.346.615 | 28 | 2.394.489 | 28 | 2.450.636 | | |
| | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 24 | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | | |
| | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 2 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 3.27.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 3.27.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | | |
| 3.27.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2.286.750,72 | | 2.312.157 | | 2.346.615 | | 2.394.489 | | 2.450.636 | | |
| Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | 4 | 2.286.750,72 | 4 | 2.312.157 | 4 | 2.346.615 | 4 | 2.394.489 | 4 | 2.450.636 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | | |
| 3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 9.289.924,8 | | 9.393.137 | | 9.533.125 | | 9.727.612 | | 9.955.707 | | |
| 16 Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 12 | 12 | 9.289.924,8 | 12 | 9.393.137 | 12 | 9.533.125 | 12 | 9.727.612 | 12 | 9.955.707 | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 25 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.27.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 3.27.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 3.27.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 9.289.924,8 | | 9.393.137 | | 9.533.125 | | 9.727.612 | | 9.955.707 | | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 25 | 25 | 9.289.924,8 | 25 | 9.393.137 | 25 | 9.533.125 | 25 | 9.727.612 | 25 | 9.955.707 | | |
| 3.27.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | | |
| 3.27.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | | |
| 3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 318.869.025,06 | | 322.411.712 | | 327.216.667 | | 333.892.281 | | 341.721.471 | | |
| 23 Paket | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 318.869.025,06 | 12 | 322.411.712 | 12 | 327.216.667 | 12 | 333.892.281 | 12 | 341.721.471 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /** | **INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT** | **BASELINE TAHUN 2024** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |
| | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | | |

| SUBKEGIATAN OUTPUT | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.300.000 | | 5.358.884 | | 5.438.748 | | 5.549.705 | | 5.679.836 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | 5.300.000 | 4 | 5.358.884 | 4 | 5.438.748 | 4 | 5.549.705 | 4 | 5.679.836 | | |
| 3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 114.417.691,38 | | 115.688.891 | | 117.413.022 | | 119.808.389 | | 122.617.686 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 114.417.691,38 | 12 | 115.688.891 | 12 | 117.413.022 | 12 | 119.808.389 | 12 | 122.617.686 | | |
| 3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 82.855.886,48 | | 83.776.429 | | 85.024.963 | | 86.759.575 | | 88.793.935 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | 82.855.886,48 | 4 | 83.776.429 | 4 | 85.024.963 | 4 | 86.759.575 | 4 | 88.793.935 | | |
| 3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.320.941,42 | | 12.457.829 | | 12.643.490 | | 12.901.432 | | 13.203.948 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 4 | 12.320.941,42 | 4 | 12.457.829 | 4 | 12.643.490 | 4 | 12.901.432 | 4 | 13.203.948 | | |
| 3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 15.270.016,14 | | 15.439.668 | | 15.669.768 | | 15.989.450 | | 16.364.375 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 15.270.016,14 | 12 | 15.439.668 | 12 | 15.669.768 | 12 | 15.989.450 | 12 | 16.364.375 | | |
| 3.27.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 88.704.489,64 | | 89.690.011 | | 91.026.676 | | 92.883.730 | | 95.061.691 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 88.704.489,64 | 12 | 89.690.011 | 12 | 91.026.676 | 12 | 92.883.730 | 12 | 95.061.691 | | |
| 3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 500.000.000 | | 505.555.081 | | 513.089.454 | | 523.557.099 | | 535.833.595 | | |
| 100% | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 500.000.000 | 1 | 505.555.081 | 1 | 513.089.454 | 1 | 523.557.099 | 1 | 535.833.595 | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | | |
| 3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
| 3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | | |
| 3.27.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 500.000.000 | | 505.555.081 | | 513.089.454 | | 523.557.099 | | 535.833.595 | | |
| Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 500.000.000 | 1 | 505.555.081 | 1 | 513.089.454 | 1 | 523.557.099 | 1 | 535.833.595 | | |
| 3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 2.618.944.321,54 | | 2.648.041.218 | | 2.687.505.423 | | 2.742.333.780 | | 2.806.636.697 | | |
| 48 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 2.618.944.321,54 | 12 | 2.648.041.218 | 12 | 2.687.505.423 | 12 | 2.742.333.780 | 12 | 2.806.636.697 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 465.829.279,04 | | 471.004.718 | | 478.024.181 | | 487.776.452 | | 499.213.954 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 465.829.279,04 | 12 | 471.004.718 | 12 | 478.024.181 | 12 | 487.776.452 | 12 | 499.213.954 | | |
| 3.27.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.153.115.042,5 | | 2.177.036.500 | | 2.209.481.242 | | 2.254.557.328 | | 2.307.422.743 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 2.153.115.042,5 | 12 | 2.177.036.500 | 12 | 2.209.481.242 | 12 | 2.254.557.328 | 12 | 2.307.422.743 | | |
| 3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 312.539.776 | | 316.012.144 | | 320.721.727 | | 327.264.838 | | 334.938.624 | | |
| 35 BMD | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 24 | 24 | 312.539.776 | 24 | 316.012.144 | 24 | 320.721.727 | 24 | 327.264.838 | 24 | 334.938.624 | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 38.764.200 | | 39.194.877 | | 39.779.005 | | 40.590.545 | | 41.542.322 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 6 | 6 | 38.764.200 | 6 | 39.194.877 | 6 | 39.779.005 | 6 | 40.590.545 | 6 | 41.542.322 | | |
| 3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 69.899.156 | | 70.675.747 | | 71.729.040 | | 73.192.399 | | 74.908.632 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4 | 4 | 69.899.156 | 4 | 70.675.747 | 4 | 71.729.040 | 4 | 73.192.399 | 4 | 74.908.632 | | |
| 3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.876.420 | | 3.919.488 | | 3.977.901 | | 4.059.055 | | 4.154.233 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 24 | 24 | 3.876.420 | 24 | 3.919.488 | 24 | 3.977.901 | 24 | 4.059.055 | 24 | 4.154.233 | | |
| 3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | 202.222.032 | | 205.235.781 | | 209.422.839 | | 214.333.437 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 202.222.032 | 1 | 205.235.781 | 1 | 209.422.839 | 1 | 214.333.437 | | |
| 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | 9.800.546.390,5 | | 9.909.500.000 | | 10.057.200.000 | | 10.262.400.000 | | 10.503.100.000 | | |
| Terwujudnya ketersediaan sarana Peternakan yang memadai dan berkelanjutan | Persentase ketersediaan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan (%) | 100 | 100 | 2.940.163.917 | 100 | 2.972.850.000 | 100 | 3.017.160.000 | 100 | 3.078.720.000 | 100 | 3.150.930.000 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian | |
| 3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1.000.000.000 | | 1.011.117.095 | | 1.026.187.683 | | 1.047.125.291 | | 1.071.685.146 | | |
| 4% | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 0 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | |
| Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 141.690.978 | | 143.266.171 | | 145.401.538 | | 148.368.208 | | 151.848.118 | | |
| Bibit ternak dan pakan ternak kualitas unggul | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan) | 8 | 42 | 141.690.978 | 42 | 143.266.171 | 42 | 145.401.538 | 42 | 148.368.208 | 42 | 151.848.118 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan) | 8 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | | | | 41.690.978 | | 42.154.461 | | 42.782.769 | | 43.655.678 | | 44.679.602 | | |
| Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan) | 8 | 42 | 41.690.978 | 42 | 42.154.461 | 42 | 42.782.769 | 42 | 43.655.678 | 42 | 44.679.602 | | |
| 3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | | | | 100.000.000 | | 101.111.710 | | 102.618.769 | | 104.712.530 | | 107.168.516 | | |
| Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan) | 8 | 12 | 100.000.000 | 12 | 101.111.710 | 12 | 102.618.769 | 12 | 104.712.530 | 12 | 107.168.516 | | |
| 3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 30% | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan) | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan) | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 100% | Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan) | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | | |
| 3.27.02.2.05.0007 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak | Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan) | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | | |
| 3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | 2.798.472.939 | | 2.829.583.829 | | 2.871.758.462 | | 2.930.351.792 | | 2.999.081.882 | | |
| 100% | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor) | 120 | 120 | 2.798.472.939 | 120 | 2.829.583.829 | 120 | 2.871.758.462 | 120 | 2.930.351.792 | 120 | 2.999.081.882 | | |
| | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton) | 0,12 | 0,24 | | 0,24 | | 0,24 | | 0,24 | | 0,24 | | | |
| 3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | 800.000.000 | | 808.893.676 | | 820.950.147 | | 837.700.234 | | 857.348.118 | | |
| Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton) | 0,12 | 0,24 | 800.000.000 | 0,24 | 808.893.676 | 0,24 | 820.950.147 | 0,24 | 837.700.234 | 0,24 | 857.348.118 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | 1.998.472.939 | | 2.020.690.153 | | 2.050.808.315 | | 2.092.651.558 | | 2.141.733.764 | | |
| Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor) | 120 | 120 | 1.998.472.939 | 120 | 2.020.690.153 | 120 | 2.050.808.315 | 120 | 2.092.651.558 | 120 | 2.141.733.764 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya ketersediaan sarana pertanian yang memadai dan berkelanjutan | Persentase ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan (%) | 90 | 90 | 6.860.382.473,5 | 90 | 6.936.650.000 | 90 | 7.040.040.000 | 90 | 7.183.680.000 | 90 | 7.352.170.000 | | |
| 3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | 5.860.382.473,5 | | 5.925.532.905 | | 6.013.852.317 | | 6.136.554.709 | | 6.280.484.854 | | |
| 100% | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata) | 0 | 0 | 5.860.382.473,5 | 0 | 5.925.532.905 | 0 | 6.013.852.317 | 0 | 6.136.554.709 | 0 | 6.280.484.854 | | |
| | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | 5.265.697.793,5 | | 5.324.237.059 | | 5.403.594.223 | | 5.513.845.340 | | 5.643.170.115 | | |
| Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) | 6 | 6 | 5.265.697.793,5 | 6 | 5.324.237.059 | 6 | 5.403.594.223 | 6 | 5.513.845.340 | 6 | 5.643.170.115 | | |
| 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 594.684.680 | | 601.295.846 | | 610.258.094 | | 622.709.369 | | 637.314.739 | | |
| Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | 6 | 6 | 594.684.680 | 6 | 601.295.846 | 6 | 610.258.094 | 6 | 622.709.369 | 6 | 637.314.739 | | |
| 3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT** | **INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT** | **BASELINE TAHUN 2024** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |
| | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | | |
| | | | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.27.02.2.01.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.27.02.2.01.0009 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.27.02.2.01.0010 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.27.02.2.01.0011 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.27.02.2.01.0015 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1.000.000.000 | | 1.011.117.095 | | 1.026.187.683 | | 1.047.125.291 | | 1.071.685.146 | | |
| 4% | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB)) | 1 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.011.117.095 | 1 | 1.026.187.683 | 1 | 1.047.125.291 | 1 | 1.071.685.146 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | | 1.000.000.000 | | 1.011.117.095 | | 1.026.187.683 | | 1.047.125.291 | | 1.071.685.146 | | |
| Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB)) | 1 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.011.117.095 | 1 | 1.026.187.683 | 1 | 1.047.125.291 | 1 | 1.071.685.146 | | |
| 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | 5.062.190.310 | | 5.118.500.000 | | 5.194.800.000 | | 5.300.800.000 | | 5.425.100.000 | | |
| Meningkatnya prasarana peternakan yang berkualitas dan mudah diakses | Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan (%) | 1 | 1 | 1.012.438.062 | 1 | 1.023.700.000 | 1 | 1.038.960.000 | 1 | 1.060.160.000 | 1 | 1.085.020.000 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian | |
| 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | 3.558.735.732 | | 3.598.321.622 | | 3.651.960.762 | | 3.726.479.095 | | 3.813.862.387 | | |
| Prasarana peternakan yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | 0 | 3 | 1.012.438.062 | 1 | 1.023.700.000 | 1 | 1.038.960.000 | 1 | 1.060.160.000 | 1 | 1.085.020.000 | | |
| | Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.27.03.2.02.0012 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan | | | | 800.000.000 | | 808.898.866 | | 820.956.888 | | 837.708.530 | | 857.352.201 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan | Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | 0 | 1 | 800.000.000 | 1 | 808.898.866 | 1 | 820.956.888 | 2 | 837.708.530 | 2 | 857.352.201 | | |
| 3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | | | | 212.438.062 | | 214.801.134 | | 218.003.112 | | 222.451.470 | | 227.667.799 | | |
| Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | 0 | 3 | 212.438.062 | 1 | 214.801.134 | 1 | 218.003.112 | 1 | 222.451.470 | 1 | 227.667.799 | | |
| Meningkatnya prasarana Pertanian yang berkualitas dan mudah diakses | Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (%) | 1 | 1 | 4.049.752.248 | 1 | 4.094.800.000 | 1 | 4.155.840.000 | 1 | 4.240.640.000 | 1 | 4.340.080.000 | | |
| 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | 1.503.454.578 | | 1.520.178.378 | | 1.542.839.238 | | 1.574.320.905 | | 1.611.237.613 | | |
| Prasarana pertanian yang dikembangkan | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen) | 0 | 3 | 1.503.454.578 | 3 | 1.520.178.378 | 3 | 1.542.839.238 | 3 | 1.574.320.905 | 3 | 1.611.237.613 | | |
| | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen) | 0 | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | | |
| | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | |
| | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 105.400.578 | | 106.573.010 | | 108.161.663 | | 110.368.704 | | 112.956.772 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) | 12 | 12 | 105.400.578 | 12 | 106.573.010 | 12 | 108.161.663 | 12 | 110.368.704 | 12 | 112.956.772 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT** | **INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT** | **BASELINE TAHUN 2024** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |
| | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | | |
| | | | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.27.03.2.01.0007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan | | | | 275.748.000 | | 278.815.306 | | 282.971.525 | | 288.745.565 | | 295.516.444 | | |
| Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 0 | 1 | 275.748.000 | 1 | 278.815.306 | 1 | 282.971.525 | 1 | 288.745.565 | 1 | 295.516.444 | | |
| 3.27.03.2.01.0010 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | | | | 322.306.000 | | 325.891.197 | | 330.749.164 | | 337.498.109 | | 345.412.199 | | |
| terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit) | 0 | 1 | 322.306.000 | 1 | 325.891.197 | 1 | 330.749.164 | 1 | 337.498.109 | 1 | 345.412.199 | | |
| 3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | 100.000.000 | | 101.112.358 | | 102.619.611 | | 104.713.566 | | 107.169.025 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen) | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 101.112.358 | 1 | 102.619.611 | 1 | 104.713.566 | 1 | 107.169.025 | | |
| 3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | | | | 500.000.000 | | 505.561.791 | | 513.098.054 | | 523.567.830 | | 535.845.124 | | |
| Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen) | 0 | 1 | 500.000.000 | 1 | 505.561.791 | 1 | 513.098.054 | 0 | 523.567.830 | 1 | 535.845.124 | | |
| 3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | | | | 200.000.000 | | 202.224.716 | | 205.239.221 | | 209.427.131 | | 214.338.049 | | |
| Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen) | 0 | 3 | 200.000.000 | 3 | 202.224.716 | 3 | 205.239.221 | 3 | 209.427.131 | 3 | 214.338.049 | | |
| 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | 3.558.735.732 | | 3.598.321.622 | | 3.651.960.762 | | 3.726.479.095 | | 3.813.862.387 | | |
| Prasarana pertanian yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit) | 16 | 5 | 2.546.297.670 | 5 | 2.574.621.622 | 5 | 2.613.000.762 | 5 | 2.666.319.095 | 5 | 2.728.842.387 | | |
| | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 4 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 7 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan | | | | 424.843.322 | | 429.569.102 | | 435.972.564 | | 444.868.593 | | 455.300.446 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | |
| Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 7 | 3 | 424.843.322 | 3 | 429.569.102 | 3 | 435.972.564 | 3 | 444.868.593 | 3 | 455.300.446 | | |
| 3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | | | | 560.000.000 | | 566.229.206 | | 574.669.821 | | 586.395.970 | | 600.146.540 | | |
| Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | 560.000.000 | 1 | 566.229.206 | 1 | 574.669.821 | 1 | 586.395.970 | 1 | 600.146.540 | | |
| 3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | 730.000.000 | | 738.120.215 | | 749.123.160 | | 764.409.033 | | 782.333.883 | | |
| Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 4 | 3 | 730.000.000 | 3 | 738.120.215 | 3 | 749.123.160 | 3 | 764.409.033 | 3 | 782.333.883 | | |
| 3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | 831.454.348 | | 840.703.099 | | 853.235.217 | | 870.645.499 | | 891.061.518 | | |
| terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit) | 16 | 5 | 831.454.348 | 5 | 840.703.099 | 5 | 853.235.217 | 5 | 870.645.499 | 5 | 891.061.518 | | |
| 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | 1.216.400.000 | | 1.230.000.000 | | 1.248.400.000 | | 1.273.900.000 | | 1.303.800.000 | | |
| Meningkatnya derajat kesehatan hewan untuk keberlanjutan usaha peternakan | Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan (%) | 8 | 8 | 1.066.400.000 | 8 | 1.078.323.000 | 8 | 1.094.454.000 | 8 | 1.116.809.500 | 8 | 1.143.022.300 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian | |
| 3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | | 100.000.000 | | 101.118.133 | | 102.630.784 | | 104.727.159 | | 107.185.142 | | |
| 15,39% | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) | 600 | 300 | 100.000.000 | 300 | 101.118.133 | 300 | 102.630.784 | 300 | 104.727.159 | 300 | 107.185.142 | | |
| 3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan | | | | 100.000.000 | | 101.118.133 | | 102.630.784 | | 104.727.159 | | 107.185.142 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) | 600 | 300 | 100.000.000 | 300 | 101.118.133 | 300 | 102.630.784 | 300 | 104.727.159 | 300 | 107.185.142 | | |
| 3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 966.400.000 | | 977.204.867 | | 991.823.216 | | 1.012.082.341 | | 1.035.837.158 | | |
| 100% | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan) | 4 | 470 | 25.000.000 | 470 | 25.279.513 | 470 | 25.657.678 | 470 | 26.181.765 | 470 | 26.796.283 | | |
| | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan) | 4 | 4.550 | | 4.550 | | 4.550 | | 4.550 | | 4.550 | | | |
| 3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | | | 25.000.000 | | 25.279.513 | | 25.657.678 | | 26.181.765 | | 26.796.283 | | |
| Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan) | 4 | 470 | 25.000.000 | 470 | 25.279.513 | 470 | 25.657.678 | 470 | 26.181.765 | 470 | 26.796.283 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | 941.400.000 | | 951.925.354 | | 966.165.538 | | 985.900.576 | | 1.009.040.875 | | |
| Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan) | 4 | 4.550 | 941.400.000 | 4.550 | 951.925.354 | 4.550 | 966.165.538 | 4.550 | 985.900.576 | 4.550 | 1.009.040.875 | | |
| Meningkatnya derajat keamanan produk hewan untuk mendukung kesehatan masyarakat serta keberlanjutan usaha peternakan | Persentase peningkatan produk hewan yang ASUH (%) | 5 | 5 | 150.000.000 | 5 | 151.677.000 | 5 | 153.946.000 | 5 | 157.090.500 | 5 | 160.777.700 | | |
| 3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 50.558.948 | | 51.315.288 | | 52.363.440 | | 53.592.568 | | |
| 27,80% | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan) | 30 | 30 | 50.000.000 | 30 | 50.558.948 | 30 | 51.315.288 | 30 | 52.363.440 | 30 | 53.592.568 | | |
| | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan) | 7 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | | 25.000.000 | | 25.279.435 | | 25.657.610 | | 26.181.675 | | 26.796.285 | | |
| Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan) | 7 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.279.435 | 12 | 25.657.610 | 12 | 26.181.675 | 12 | 26.796.285 | | |
| 3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 25.000.000 | | 25.279.513 | | 25.657.678 | | 26.181.765 | | 26.796.283 | | |
| Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan) | 30 | 30 | 25.000.000 | 30 | 25.279.513 | 30 | 25.657.678 | 30 | 26.181.765 | 30 | 26.796.283 | | |
| 3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | 75.000.000 | | 75.838.539 | | 76.973.034 | | 78.545.295 | | 80.388.849 | | |
| 10% | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen) | 1 | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.838.539 | 12 | 76.973.034 | 12 | 78.545.295 | 12 | 80.388.849 | | |
| | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha) | 10 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | 25.000.000 | | 25.279.513 | | 25.657.678 | | 26.181.765 | | 26.796.283 | | |
| Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan) | 12 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.279.513 | 12 | 25.657.678 | 12 | 26.181.765 | 12 | 26.796.283 | | |
| 3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | | | | 25.000.000 | | 25.279.513 | | 25.657.678 | | 26.181.765 | | 26.796.283 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |

| SUBKEGIATAN OUTPUT | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha) | 10 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.279.513 | 12 | 25.657.678 | 12 | 26.181.765 | 12 | 26.796.283 | | |
| 3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | | 25.000.000 | | 25.279.513 | | 25.657.678 | | 26.181.765 | | 26.796.283 | | |
| Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen) | 1 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.279.513 | 12 | 25.657.678 | 12 | 26.181.765 | 12 | 26.796.283 | | |
| 3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | | | | 25.000.000 | | 25.279.513 | | 25.657.678 | | 26.181.765 | | 26.796.283 | | |
| 100% | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit) | 18 | 18 | 25.000.000 | 18 | 25.279.513 | 18 | 25.657.678 | 18 | 26.181.765 | 18 | 26.796.283 | | |
| 3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | | | | 25.000.000 | | 25.279.513 | | 25.657.678 | | 26.181.765 | | 26.796.283 | | |
| Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit) | 18 | 18 | 25.000.000 | 18 | 25.279.513 | 18 | 25.657.678 | 18 | 26.181.765 | 18 | 26.796.283 | | |
| 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | 980.645.720 | | 1.039.484.464 | | 1.101.853.531 | | 1.167.964.743 | | 1.238.042.628 | | |
| Berkurangnya risiko kerugian usaha tani akibat bencana pertanian melalui sistem mitigasi dan penanggulangan yang efektif | Persentase Luas Wilayah yang Terkendali Bencana Pertaniannya (%) | 90 | 90 | 980.645.720 | 90 | 1.039.484.464 | 90 | 1.101.853.531 | 90 | 1.167.964.743 | 90 | 1.238.042.628 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian | |
| 3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | 980.645.720 | | 1.039.484.464 | | 1.101.853.531 | | 1.167.964.743 | | 1.238.042.628 | | |
| 95% | Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (laporan) | 2 | 2 | 980.645.720 | 2 | 1.039.484.464 | 2 | 1.101.853.531 | 2 | 1.167.964.743 | 2 | 1.238.042.628 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) | 1.734 | 1.734 | | 1.734 | | 1.734 | | 1.734 | | 1.734 | | | |
| | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha) | 500 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | | |
| | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) | 500 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | | |
| 3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | 530.000.000 | | 561.800.000 | | 595.508.000 | | 631.238.480 | | 669.112.789 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) | 1.734 | 1.734 | 530.000.000 | 1.734 | 561.800.000 | 1.734 | 595.508.000 | 1.734 | 631.238.480 | 1.734 | 669.112.789 | | |
| 3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | 450.645.720 | | 477.684.464 | | 506.345.531 | | 536.726.263 | | 568.929.839 | | |
| Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) | 500 | 500 | 450.645.720 | 500 | 477.684.464 | 500 | 506.345.531 | 500 | 536.726.263 | 500 | 568.929.839 | | |
| 3.27.05.2.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha) | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | | |
| 3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 3.27.05.2.01.0007 - Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (laporan) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | 30.000.000 | | 30.400.000 | | 30.900.000 | | 31.600.000 | | 32.400.000 | | |
| Meningkatnya kemudahan berusaha di sektor Pertanian melalui layanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel | persentase rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang diawasi pelaksanaannya secara berkala (%) | 100 | 100 | 6.000.000 | 100 | 6.080.000 | 100 | 6.180.000 | 100 | 6.320.000 | 100 | 6.480.000 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian | |
| 3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 6.000.000 | | 6.080.000 | | 6.180.000 | | 6.320.000 | | 6.480.000 | | |
| 100% | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen) | 1 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.080.000 | 1 | 6.180.000 | 1 | 6.320.000 | 1 | 6.480.000 | | |
| | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 3.27.06.2.01.0001 - Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | | | | 1.000.000 | | 1.013.334 | | 1.030.000 | | 1.053.334 | | 1.080.000 | | |
| Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen) | 1 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.013.334 | 1 | 1.030.000 | 1 | 1.053.334 | 1 | 1.080.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | 4.000.000 | | 4.053.333 | | 4.120.000 | | 4.213.333 | | 4.320.000 | | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT** | **INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT** | **BASELINE TAHUN 2024** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |
| | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | | |
| | | | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen) | 0 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.053.333 | 1 | 4.120.000 | 1 | 4.213.333 | | 4.320.000 | | |
| 3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | | 1.000.000 | | 1.013.333 | | 1.030.000 | | 1.053.333 | | 1.080.000 | | |
| Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan) | 1 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.013.333 | 1 | 1.030.000 | 1 | 1.053.333 | 1 | 1.080.000 | | |
| Meningkatnya kemudahan berusaha di sektor Peternakan melalui layanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel | persentase rekomendasi izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala (%) | 100 | 100 | 24.000.000 | 100 | 24.320.000 | 100 | 24.720.000 | 100 | 25.280.000 | 100 | 25.920.000 | | |
| 3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | | | 24.000.000 | | 24.320.000 | | 24.720.000 | | 25.280.000 | | 25.920.000 | | |
| 83,30% | Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan) | 20 | 20 | 24.000.000 | 20 | 24.320.000 | 20 | 24.720.000 | 20 | 25.280.000 | 20 | 25.920.000 | | |
| | Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen) | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan) | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.06.2.02.0001 - Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | | | 12.000.000 | | 12.160.000 | | 12.360.000 | | 12.640.000 | | 12.960.000 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen) | 20 | 20 | 12.000.000 | 20 | 12.160.000 | 20 | 12.360.000 | 20 | 12.640.000 | 20 | 12.960.000 | | |
| 3.27.06.2.02.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | | | | 4.000.000 | | 4.053.334 | | 4.120.000 | | 4.213.334 | | 4.320.000 | | |
| Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan) | 20 | 20 | 4.000.000 | 20 | 4.053.334 | 20 | 4.120.000 | 20 | 4.213.334 | 20 | 4.320.000 | | |
| 3.27.06.2.02.0003 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan | | | | 4.000.000 | | 4.053.333 | | 4.120.000 | | 4.213.333 | | 4.320.000 | | |
| Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan | Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan) | 20 | 20 | 4.000.000 | 20 | 4.053.333 | 20 | 4.120.000 | 20 | 4.213.333 | 20 | 4.320.000 | | |
| 3.27.06.2.02.0005 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan | | | | 4.000.000 | | 4.053.333 | | 4.120.000 | | 4.213.333 | | 4.320.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan | Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan) | 6 | 6 | 4.000.000 | 6 | 4.053.333 | 6 | 4.120.000 | 6 | 4.213.333 | 6 | 4.320.000 | | |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | 4.602.320.479 | | 4.653.500.000 | | 4.722.900.000 | | 4.819.300.000 | | 4.932.300.000 | | |
| Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani | Persentase kelompok tani yang nilai skor/kelas kapasitas kelembagaanya naik (%) | 2 | 2 | 4.602.320.479 | 2 | 4.653.500.000 | 2 | 4.722.900.000 | 2 | 4.819.300.000 | 2 | 4.932.300.000 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian | |
| 3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | 4.602.320.479 | | 4.653.500.000 | | 4.722.900.000 | | 4.819.300.000 | | 4.932.300.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen) | 0 | 1 | 4.602.320.479 | 1 | 4.653.500.000 | 1 | 4.722.900.000 | 1 | 4.819.300.000 | 1 | 4.932.300.000 | | |
| | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit) | 24 | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit) | 24 | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | | |
| | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 0 | 106 | | 106 | | 106 | | 106 | | 106 | | | |
| | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 48 | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | |
| | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 24 | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | | |
| 3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | 657.474.355 | | 664.785.716 | | 674.700.002 | | 688.471.430 | | 704.614.288 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 24 | 24 | 657.474.355 | 24 | 664.785.716 | 24 | 674.700.002 | 24 | 688.471.430 | 24 | 704.614.288 | | |
| 3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | 1.314.948.708 | | 1.329.571.428 | | 1.349.399.999 | | 1.376.942.856 | | 1.409.228.570 | | |
| Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 48 | 48 | 1.314.948.708 | 48 | 1.329.571.428 | 48 | 1.349.399.999 | 48 | 1.376.942.856 | 48 | 1.409.228.570 | | |
| 3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit) | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | | |
| 3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 657.474.354 | | 664.785.714 | | 674.700.000 | | 688.471.429 | | 704.614.286 | | |
| Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit) | 24 | 24 | 657.474.354 | 24 | 664.785.714 | 24 | 674.700.000 | 24 | 688.471.429 | 24 | 704.614.286 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | | | | 1.314.948.708 | | 1.329.571.428 | | 1.349.399.999 | | 1.376.942.856 | | 1.409.228.570 | | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT** | **INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT** | **BASELINE TAHUN 2024** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |
| | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | | |
| | | | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 0 | 106 | 1.314.948.708 | 106 | 1.329.571.428 | 106 | 1.349.399.999 | 106 | 1.376.942.856 | 106 | 1.409.228.570 | | |
| 3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | | 657.474.354 | | 664.785.714 | | 674.700.000 | | 688.471.429 | | 704.614.286 | | |
| Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen) | 0 | 1 | 657.474.354 | 1 | 664.785.714 | 1 | 674.700.000 | 1 | 688.471.429 | 1 | 704.614.286 | | |

## 4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

### a. Matrik Subkegiatan Prioritas

Lembar kerja ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan dan menajamkan subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah, Melalui instrumen ini Dinas Pertanian diharapkan dapat mengidentifikasi subkegiatan yang benar-benar relevan dengan sasaran Pembangunan, menyelaraskan rencana kerja dengan arah kebijakan, strategi, dan target kinerja daerah, Memastikan keterpaduan antarprogram sehingga mendukung efisiensi, efektivitas, serta keberlanjutan Pembangunan. Dokumen ini bukan hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi Masyarakat. Adapun matrik subkegiatan prioritas Dinas Pertanian periode 2025-2029 sbb :

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN /SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| 1 | SAE GUS-PUK | Sarana Pertanian yang aktif digunakan kelompok tani | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian / Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1. Gugus tugas pupuk dan bibit kolaboratif integratif di desa urusan pemerintahan bidang pertanian<br>2. Rp 5 miliar untuk subsidi pupuk bagi petani tembakau - urusan pemerintahan bidang pertanian<br>3. 1 desa 1 pusat pupuk dan bibit- urusan pemerintahan bidang pertanian |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SAE BERTANI | Sarana Pertanian yang aktif digunakan kelompok tani | 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian / Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi<br>2. Pengembangan Prasarana Pertanian / Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota<br>3. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian / Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 1. 3 pasar transit agro-urusan pemerintahan bidang pertanian<br>2. 1 pasar induk agro-urusan pemerintahan bidang pertanian<br>3. Desa berseri tematik-urusan pemerintahan bidang pertanian<br>4. Perda perlindungan dan pemberdayaan petani - urusan pemerintahan bidang pertanian |

Dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo di bidang pertanian, terdapat dua program utama yang dirinci sebagai berikut:

1. SAE GUS-PUK
   Fokus pada penyediaan sarana pertanian yang aktif dimanfaatkan oleh kelompok tani. Subkegiatannya berupa pengawasan penggunaan sarana pertanian sesuai komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi. Dukungan kegiatan meliputi:
   - Pembentukan gugus tugas pupuk dan bibit secara kolaboratif di tingkat desa.
   - Alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 5 miliar bagi petani tembakau.
   - Pengadaan pusat pupuk dan bibit di setiap desa.

2. SAE BERTANI
   Juga diarahkan untuk memastikan sarana pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani. Subkegiatannya meliputi Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota, serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Dukungan kegiatan yang direncanakan antara lain:
   - Pembangunan tiga pasar transit agro.
   - Pembangunan satu pasar induk agro.
   - Pengembangan desa berseri tematik di bidang pertanian.

- Penyusunan peraturan daerah terkait perlindungan dan pemberdayaan petani.

Kedua program ini menekankan keterpaduan antara pengawasan, penyediaan sarana, pengembangan infrastruktur pendukung, serta regulasi yang melindungi petani, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kemandirian sektor pertanian kabupaten probolinggo.

**b. Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian. Penyusunan IKU ini dimaksudkan untuk memastikan arah pembangunan sektor pertanian berjalan selaras dengan visi, misi, dan program prioritas daerah, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

IKU dalam Renstra Dinas Pertanian disusun dengan prinsip terukur, relevan, dan dapat dicapai, sehingga menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam merumuskan program, kegiatan, maupun subkegiatan. Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat evaluasi kinerja yang obyektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui penetapan IKU yang tepat, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki arah yang sama dalam mewujudkan pertanian yang maju, berdaya saing, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut IKU Dinas Pertanian periode 2025-2029 :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian | | | | | | | | | |
| 2. | Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | % | 1,58 | 1,85 | 2,11 | 2,38 | 2,64 | 2,91 | 3,17 | |
| 3. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 4. | Persentase peningkatan produksi sub sektor tanaman pangan | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 5. | Persentase peningkatan produksi sub sektor hortikultura | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6. | Persentase peningkatan produksi sub sektor perkebunan | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 7. | Persentase peningkatan produksi dan populasi sub sektor peternakan | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian 2025–2030 difokuskan pada pertumbuhan PDRB sektor pertanian yang ditargetkan meningkat dari 1,85% menjadi 3,17%, serta peningkatan produksi subsektor strategis. Produksi tanaman pangan ditetapkan stabil 3% per tahun, hortikultura 3% per tahun, perkebunan 3% per tahun, dan peternakan 1% setiap tahun. IKU ini menjadi acuan kinerja dinas dalam menjaga ketahanan pangan, memperkuat subsektor unggulan, serta meningkatkan kontribusi pertanian terhadap perekonomian daerah.

### c. Indikator Kinerja Kunci

Tabel berikut memuat Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian yang akan menjadi ukuran utama keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2025–2030. Indikator ini dirancang untuk mengukur kinerja secara menyeluruh, mencakup peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan, serta efektivitas pengendalian bencana pertanian dan penyakit hewan menular strategis.

Penetapan indikator ini bertujuan memastikan arah pembangunan pertanian dapat dipantau secara terukur, dengan target tahunan yang konsisten dan realistis. Melalui indikator tersebut, kinerja Dinas Pertanian dapat dievaluasi secara obyektif, akuntabel, dan berkesinambungan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | Base Line 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 1 | Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | % | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS) | % | 72,12 | 65,45 | 66,11 | 66,77 | 67,44 | 68,11 | 68,79 | |
| | | | | | | | | | | |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan pertanian daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta indikator kinerja yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembangunan pertanian yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Untuk menjamin keterlaksanaan Renstra secara efektif, maka pelaksanaannya berpedoman pada kaidah-kaidah berikut:

1. Keterpaduan dengan Dokumen Perencanaan Spasial

   Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam Renstra harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan spasial, baik di tingkat makro (RTRW) maupun mikro (RDTR). Hal ini untuk memastikan bahwa intervensi pembangunan pertanian relevan dengan sebaran potensi wilayah dan mendukung pencapaian target kinerja secara spesifik dan tepat sasaran.

2. Koordinasi Antar Perangkat Daerah

   Pelaksanaan Renstra dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, baik dalam rumpun urusan pertanian maupun lintas rumpun (*joint outcomes*). Koordinasi ini bertujuan memastikan sinergi program, menghindari duplikasi, serta memperkuat pencapaian *outcome* pembangunan daerah.

3. Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Program

   Setiap program dan kegiatan pertanian harus dijalankan dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan dan efektivitas waktu pelaksanaan. Kaidah ini dimaksudkan agar capaian target kinerja dapat terwujud

secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara tepat.

4. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi

   Pelaksanaan Renstra wajib disertai mekanisme pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala. Hal ini untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah perbaikan yang dibutuhkan.

5. Akuntabilitas dan Transparansi

   Seluruh proses pelaksanaan Renstra harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan yang jelas, terarah, dan terukur dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 27 September 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN

**ARIF KURNIADI, SP, MM**
Pembina Tingkat I
NIP. 19710103 199903 1 003

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023. Namun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang mengamanahkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah di lantik pada tanggal 20 Februari 2025, menuangkan visi, misi, dan komitmen politik dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2025 hingga 2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah merupakan dokumen induk yang menjadi acuan utama bagi seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dengan terpilihnya Bupati baru, prioritas pembangunan daerah berubah. Dan oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan RPJMD yang baru. Dokumen ini harus mencerminkan visi dan misi Bupati terpilih, serta menjabarkan program dan kegiatan yang konkret untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun untuk menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut menjadi pedoman dan panduan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Didalam proses penyusunannya, terdapat dinamika perubahan di lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang terus berubah. Secara internal, terdapat perubahan kebijakan pemerintah daerah, dinamika organisasi, dan potensi sumber daya yang ada. Secara eksternal, terdapat isu-isu strategis seperti perkembangan politik, sosial, dan keamanan di tingkat nasional maupun daerah yang harus direspon secara proaktif oleh Sekretariat DPRD. Renstra ini disusun untuk mengantisipasi dan menjawab tantangan serta peluang yang muncul dari perubahan tersebut. Penyusunan Renstra juga didasarkan pada evaluasi kinerja Sekretariat DPRD selama periode sebelumnya (2020-2024). Analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target-target sebelumnya menjadi masukan penting untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang lebih realistis dan efektif di masa mendatang. Dengan demikian, Renstra yang disusun bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi merupakan peta jalan yang realistis dan responsif terhadap kondisi di lapangan, berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas layanan dan program kerjanya sehingga mampu mewujudkan tujuannya untuk menjadi supporting system bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LembaranRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Probolinggo Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022;

31. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029;
35. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029 sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin

dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2025-2029;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional rentang waktu tahunan dan lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo;
8. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029;
9. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah
2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029;
3.2 Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029;
3.3 Strategi Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029;
3.4 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Uraian Program;
4.2 Uraian Kegiatan;
4.3 Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD; dan

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat DPRD di wilayah Kabupaten Probolinggo. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis bidang Sekretariat DPRD;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Sekretariat DPRD;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Sekretariat DPRD;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang Sekretariat DPRD; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD ;
2. Bagian Umum, membawahi:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahi kelompok jabatan fungsional;
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

### 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempuyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris DPRD juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan tata usaha umum, keuangan, perencanaan, dan perbekalan materiil yang diperlukan oleh DPRD;
b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan anggaran Sekretariat DPRD;
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan mengadakan pemeliharaan rumah jabatan dan gedung DPRD;
d. Pelaksanaan urusan pengendalian di bidang personil, materiil, dan finansial;
e. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD;

Kasubag Umum, membawahi :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan serta mengoordinasikan bidang ketatausahaan yang meliputi mengatur dan memeriksa surat-surat dan mengelola administrasi kepegawaian serta kearsipan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan tata usaha umum yang meliputi pengurusan surat menyurat, pengaturan klasifikasi surat, serta mencatat dan menyimpan naskah dinas yang masuk dan keluar;
b. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
d. pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pengadministrasian, serta perawatan barang-barang milik dinas;
e. penyelenggaraan perawatan dan perbaikan kendaraan dinas;
f. penyelenggaraan penataan kearsipan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/ anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

### 2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan perundang-undangan, persidangan dan risalah, humas, protokol dan publikasi, serta menyediakan tenaga ahli.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
b. penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
c. penyusunan naskah akademik dan *draft* Raperda inisiatif;
d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi, dan analisis produk peraturan perundang-undangan;
e. pengumpulan bahan penyiapan *draft* Raperda Inisiatif;
f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
g. penyusunan risalah rapat;

h. pengoordinasian pembahasan raperda;
i. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
j. pelaksanaan verifikasi, koordinasi, dan evaluasi risalah rapat;
k. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
l. penyelenggaraan publikasi;
m. penyelenggaraan keprotokolan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

### 2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, dan layanan aspirasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPAS PPAS Perubahan;
b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan APBD/APBD Perubahan;
c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban;
e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;

h. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakkan kode etik DPRD;
i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

### 2.1.5 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jenis, jenjang, dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dapat dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator.

Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.

Subkoordinator yang dimaksud ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator ditetapkan oleh Sekretaris DPRD atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas.

Adapun Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

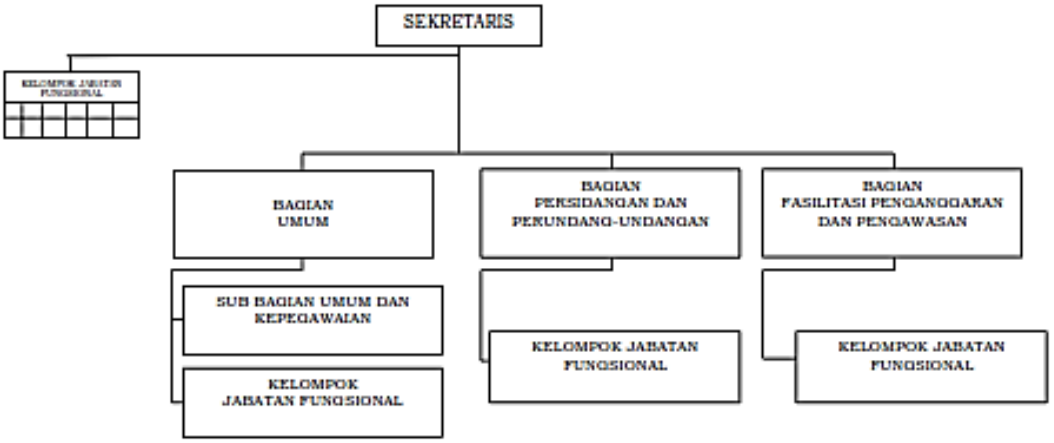


**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo**

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo.

Pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo harus dilaksanakan secara professional, efektif, dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumberdaya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas, dan profesional dalam

merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo.

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah tentanan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo sesuai struktur organisasi dan peta jabatan terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum, membawahi:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi ;
   a. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi ;
   a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

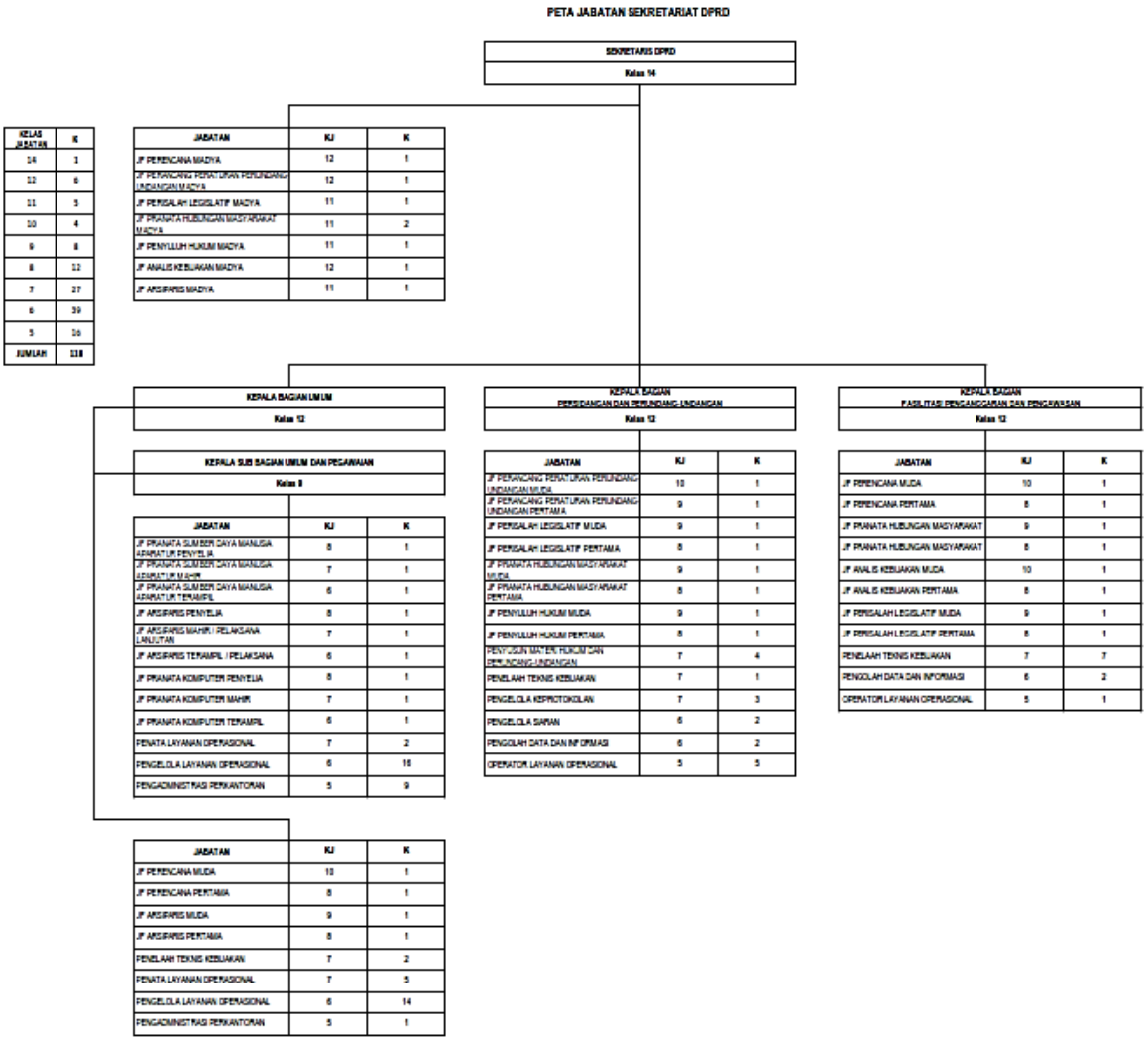


Gambar 2.2 Peta Jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo

Adapun Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo sebanyak 49 Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 1 orang
2. Eselon III : 3 orang
3. Eselon IV : 1 orang
4. Pejabat fungsional : 23 orang
5. Non PNS : 21 Orang

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo sebanyak 49 orang yang terdiri dari 28 orang ASN dan 21 orang Non-ASN. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Magister S-2 : 7 orang
2. Sarjana S-1 : 20 orang
3. Diploma-3 : 1 orang
4. SLTA : 19 orang
5. SLTP : 0 orang
6. SD : 0 orang

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo

Sementara itu, untuk sarana dan prasarana / perlengkapan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) Periode 31 Desember 2024**

| No | Nama Barang | Jumlah | Satuan | Harga Satuan Perolehan Rp. | Nilai Perolehan (Rp) | Cara Perolehan | Tanggal Perolehan | Status Penggunaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **BANGUNAN GEDUNG KANTOR** | **1** | | | **26.764.767.650** | | | |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | Meter Persegi | 26.764.767.650 | 26.764.767.650 | Pengadaan APBD | 31/12/2006 | Sekretariat DPRD |
| 3 | **PAGAR** | **1** | | | **3.510.000** | | | |
| 4 | Pagar Permanen | 1 | Meter Persegi | 3.510.000 | 3.510.000 | Pengadaan APBD | 11/09/2020 | Sekretariat DPRD |
| 5 | **TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA** | | | | **999744000** | | | |
| 6 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 7410,00 | | 999744000 | 999744000 | Pengadaan APBD | 28/08/2007 | Sekretariat DPRD |
| 7 | **ELECTRIC GENERATING SET** | **1,00** | | | **1.138.406.000** | | | |
| 8 | Portable Generating Set | 1,00 | Unit | 1.138.406.000 | 1.138.406.000 | Pengadaan APBD | 28/12/2011 | Sekretariat DPRD |
| 9 | **POMPA** | **3,00** | | | **7.320.000** | | | |
| 10 | Pompa Air | 3,00 | Unit | 2.410.000 | 2.410.000 | Pengadaan APBD | 02/12/2016 | Sekretariat DPRD |
| 11 | **KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN** | **10,00** | | | **4.447.477.000** | | | |
| 12 | Station Wagon | 4,00 | Unit | 131.175.000 | 131.175.000 | Pengadaan APBD | 31/12/2008 | Sekretariat DPRD |
| 13 | Lain-lain Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 6,00 | Unit | 308.700.000 | 308.700.000 | Pengadaan APBD | 25/05/2015 | Sekretariat DPRD |
| 14 | **KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG** | **1,00** | | | **157.400.000** | | | |
| 15 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 1,00 | Unit | 157.400.000 | 157.400.000 | Pengadaan APBD | 30/12/2011 | Sekretariat DPRD |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG** | **1,00** | | | **99.760.000** | | | |
| 17 | Pick Up | 1,00 | Unit | 99.760.000 | 99.760.000 | Pengadaan APBD | 08/08/2014 | Sekretariat DPRD |
| 18 | **KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA** | **14,00** | | | **191.655.000** | | | |
| 19 | Sepeda Motor | 3,00 | Unit | 6.600.000 | 6.600.000 | Pengadaan APBD | 31/12/2002 | Sekretariat DPRD |
| 20 | Sepeda Motor | 1,00 | Unit | 13.700.000 | 13.700.000 | Pengadaan APBD | 31/12/2010 | Sekretariat DPRD |
| 21 | Sepeda Motor | 6,00 | Unit | 13.782.500 | 13.782.500 | Pengadaan APBD | 24/09/2014 | Sekretariat DPRD |
| 22 | Sepeda Motor | 4,00 | Unit | 18.865.000 | 18.865.000 | Pengadaan APBD | 03/12/2018 | Sekretariat DPRD |
| 23 | **ALAT ANGKUTAN KERETA REL** | **2,00** | | | **7.500.000** | | | |
| 24 | Trolly Car/Lori | 2,00 | Unit | 3.750.000 | 3.750.000 | Pengadaan APBD | 18/09/2024 | Sekretariat DPRD |
| 25 | **ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR** | **2,00** | | | **10.500.000** | | | |
| 26 | **KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG** | **2,00** | | | **10.500.000** | | | |
| 27 | Baggage Trolly | 2,00 | Unit | 5.250.000 | 5.250.000 | Pengadaan APBD | 18/09/2024 | Sekretariat DPRD |
| 28 | **ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK** | **3,00** | | | **4.149.000** | | | |
| 29 | Lain-lain Alat Penyimpanan | 3,00 | Unit | 1.383.000 | 1.383.000 | Pengadaan APBD | 07/12/2014 | Sekretariat DPRD |
| 30 | **ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN** | **5,00** | | | **5.000.000** | | | |
| 31 | Rak-Rak Penyimpan | 5,00 | Unit | 1.000.000 | 1.000.000 | Pengadaan APBD | 18/11/2015 | Sekretariat DPRD |
| 32 | **MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH** | **3,00** | | | **43.618.900** | | | |
| 33 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | 1,00 | Unit | 9.550.000 | 9.550.000 | Pengadaan APBD | 14/06/2012 | Sekretariat DPRD |
| 34 | Mesin Penghitung Uang | 1,00 | Unit | 29.997.000 | 29.997.000 | Pengadaan APBD | 27/06/2016 | Sekretariat DPRD |
| 35 | Mesin Penghitung Uang | 1,00 | Unit | 4.071.900 | 4.071.900 | Pengadaan APBD | 08/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 36 | **ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)** | **3,00** | | | **167.655.000** | | | |
| 37 | Mesin Fotocopy Electronic | 1,00 | Unit | 49.000.000 | 49.000.000 | Pengadaan APBD | 27/11/2020 | Sekretariat DPRD |
| 38 | Mesin Fotocopy Lainnya | 2,00 | Unit | 59.327.500 | 59.327.500 | Pengadaan APBD | 14/06/2012 | Sekretariat DPRD |
| 39 | **ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR** | **34,00** | | | **174.843.750** | | | |
| 40 | Lemari Kayu | 5,00 | Unit | 426.250 | 426.250 | Pengadaan APBD | 31/12/2000 | Sekretariat DPRD |
| 41 | Lemari Kayu | 1,00 | Unit | 4.675.000 | 4.675.000 | Pengadaan APBD | 31/12/2001 | Sekretariat DPRD |
| 42 | Lemari Kayu | 2,00 | Unit | 508.750 | 508.750 | Pengadaan APBD | 31/12/2002 | Sekretariat DPRD |
| 43 | Lemari Kayu | 5,00 | Unit | 4.450.000 | 4.450.000 | Pengadaan APBD | 10/06/2011 | Sekretariat DPRD |
| 44 | Lemari Kayu | 8,00 | Unit | 2.850.000 | 2.850.000 | Pengadaan APBD | 14/06/2012 | Sekretariat DPRD |
| 45 | Rak Besi | 1,00 | Unit | 10.670.000 | 10.670.000 | Pengadaan APBD | 23/12/2021 | Sekretariat DPRD |
| 46 | Filing Cabinet Kayu | 2,00 | Unit | 3.000.000 | 3.000.000 | Pengadaan APBD | 18/11/2015 | Sekretariat DPRD |
| 47 | Brandkas | 2,00 | Unit | 4.800.000 | 4.800.000 | Pengadaan APBD | 10/06/2011 | Sekretariat DPRD |
| 48 | Brandkas | 1,00 | Unit | 64.900.000 | 64.900.000 | Pengadaan APBD | 27/06/2016 | Sekretariat DPRD |
| 49 | Lemari Kaca | 7,00 | Unit | 4.400.000 | 4.400.000 | Pengadaan APBD | 18/08/2021 | Sekretariat DPRD |
| 50 | **ALAT KANTOR LAINNYA** | **81,00** | | | **551.915.324** | | | |
| 51 | CCTV - Camera Control Television System | 1,00 | Unit | 41.882.800 | 41.882.800 | Pengadaan APBD | 31/12/2012 | Sekretariat DPRD |
| 52 | CCTV - Camera Control Television System | 1,00 | Unit | 23.495.000 | 23.495.000 | Pengadaan APBD | 15/12/2014 | Sekretariat DPRD |
| 53 | CCTV - Camera Control Television System | 1,00 | Unit | 53.830.000 | 53.830.000 | Pengadaan APBD | 30/07/2020 | Sekretariat DPRD |
| 54 | CCTV - Camera Control Television System | 3,00 | Unit | 850.000 | 850.000 | Pengadaan APBD | 30/07/2021 | Sekretariat DPRD |
| 55 | CCTV - Camera Control Television System | 5,00 | Unit | 2.050.000 | 2.050.000 | Pengadaan APBD | 30/07/2021 | Sekretariat DPRD |
| 56 | CCTV - Camera Control Television System | 1,00 | Unit | 15.000.000 | 15.000.000 | Pengadaan APBD | 22/03/2024 | Sekretariat DPRD |
| 57 | Papan Visual/Papan Nama | 2,00 | Unit | 12.000.000 | 12.000.000 | Pengadaan APBD | 01/12/2020 | Sekretariat DPRD |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Alat Penghancur Kertas | 1,00 | Unit | 7.500.000 | 7.500.000 | Pengadaan APBD | 13/08/2015 | Sekretariat DPRD |
| 59 | Alat Penghancur Kertas | 2,00 | Unit | 3.173.500 | 3.173.500 | Pengadaan APBD | 27/06/2016 | Sekretariat DPRD |
| 60 | Alat Penghancur Kertas | 1,00 | Unit | 12.705.000 | 12.705.000 | Pengadaan APBD | 27/06/2016 | Sekretariat DPRD |
| 61 | Alat Penghancur Kertas | 5,00 | Unit | 6.349.200 | 6.349.200 | Pengadaan APBD | 28/03/2024 | Sekretariat DPRD |
| 62 | Mesin Absensi | 1,00 | Unit | 10.000.000 | 10.000.000 | Pengadaan APBD | 04/06/2014 | Sekretariat DPRD |
| 63 | Mesin Absensi | 1,00 | Unit | 11.581.025 | 11.581.025 | Pengadaan APBD | 24/10/2018 | Sekretariat DPRD |
| 64 | Overhead Projector | 1,00 | Unit | 3.237.500 | 3.237.500 | Pengadaan APBD | 31/12/2002 | Sekretariat DPRD |
| 65 | Mesin Laminating | 1,00 | Unit | 4.500.000 | 4.500.000 | Pengadaan APBD | 13/08/2015 | Sekretariat DPRD |
| 66 | LCD Projector/Infocus | 1,00 | Unit | 56.700.000 | 56.700.000 | Pengadaan APBD | 13/12/2021 | Sekretariat DPRD |
| 67 | LCD Projector/Infocus | 4,00 | Unit | 11.750.000 | 11.750.000 | Pengadaan APBD | 09/11/2022 | Sekretariat DPRD |
| 68 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 1,00 | Unit | 34.500.000 | 34.500.000 | Pengadaan APBD | 30/09/2016 | Sekretariat DPRD |
| 69 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 2,00 | Unit | 80.999.995 | 80.999.995 | Pengadaan APBD | 13/12/2021 | Sekretariat DPRD |
| 70 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 4,00 | Unit | 2.650.000 | 2.650.000 | Pengadaan APBD | 10/11/2022 | Sekretariat DPRD |
| 71 | Brand Kas | 10,00 | Unit | 370.000 | 370.000 | Pengadaan APBD | 31/12/2013 | Sekretariat DPRD |
| 72 | Brand Kas | 4,00 | Unit | 1.900.000 | 1.900.000 | Pengadaan APBD | 11/08/2016 | Sekretariat DPRD |
| 73 | Brand Kas | 8,00 | Unit | 2.700.000 | 2.700.000 | Pengadaan APBD | 11/08/2016 | Sekretariat DPRD |
| 74 | Brand Kas | 16,00 | Unit | 3.700.000 | 3.700.000 | Pengadaan APBD | 11/08/2016 | Sekretariat DPRD |
| 75 | Brand Kas | 2,00 | Unit | 12.250.000 | 12.250.000 | Pengadaan APBD | 11/08/2016 | Sekretariat DPRD |
| 76 | Brand Kas | 1,00 | Unit | 1.600.000 | 1.600.000 | Pengadaan APBD | 08/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 77 | Brand Kas | 1,00 | Unit | 10.091.000 | 10.091.000 | Pengadaan APBD | 30/07/2021 | Sekretariat DPRD |
| 78 | **MEUBELAIR** | **142,00** | | | **889.663.540** | | | |
| 79 | Kursi Besi/Metal | 7,00 | Unit | 3.620.000 | 3.620.000 | Pengadaan APBD | 01/09/2021 | Sekretariat DPRD |
| 80 | Kursi Besi/Metal | 5,00 | Unit | 9.075.000 | 9.075.000 | Pengadaan APBD | 09/09/2021 | Sekretariat DPRD |
| 81 | Meja Rapat | 4,00 | Unit | 14.000.000 | 14.000.000 | Pengadaan APBD | 01/09/2021 | Sekretariat DPRD |
| 82 | Meja Resepsionis | 1,00 | Unit | 67.146.500 | 67.146.500 | Pengadaan APBD | 27/10/2016 | Sekretariat DPRD |
| 83 | Meja Tambahan | 1,00 | Unit | 13.600.000 | 13.600.000 | Pengadaan APBD | 01/09/2021 | Sekretariat DPRD |
| 84 | Kursi Rapat | 26,00 | Unit | 1.500.000 | 1.500.000 | Pengadaan APBD | 14/06/2012 | Sekretariat DPRD |
| 85 | Kursi Rapat | 45,00 | Unit | 3.850.000 | 3.850.000 | Pengadaan APBD | 15/05/2018 | Sekretariat DPRD |
| 86 | Kursi Rapat | 20,00 | Unit | 341.000 | 341.000 | Pengadaan APBD | 23/12/2021 | Sekretariat DPRD |
| 87 | Kursi Tamu | 4,00 | Unit | 18.000.000 | 18.000.000 | Pengadaan APBD | 07/02/2013 | Sekretariat DPRD |
| 88 | Partisi | 1,00 | Unit | 130.040.460 | 130.040.460 | Pengadaan APBD | 04/09/2020 | Sekretariat DPRD |
| 89 | Partisi | 1,00 | Unit | 27.184.740 | 27.184.740 | Pengadaan APBD | 23/10/2020 | Sekretariat DPRD |
| 90 | Partisi | 1,00 | Unit | 15.975.840 | 15.975.840 | Pengadaan APBD | 23/12/2021 | Sekretariat DPRD |
| 91 | Sofa | 5,00 | Unit | 19.900.000 | 19.900.000 | Pengadaan APBD | 07/09/2015 | Sekretariat DPRD |
| 92 | Sofa | 2,00 | Unit | 5.170.000 | 5.170.000 | Pengadaan APBD | 23/12/2021 | Sekretariat DPRD |
| 93 | Sofa | 2,00 | Unit | 10.890.000 | 10.890.000 | Pengadaan APBD | 23/12/2021 | Sekretariat DPRD |
| 94 | Filling Besi/Metal | 6,00 | Unit | 1.925.000 | 1.925.000 | Pengadaan APBD | 27/04/2016 | Sekretariat DPRD |
| 95 | Filling Besi/Metal | 5,00 | Unit | 8.000.000 | 8.000.000 | Pengadaan APBD | 11/08/2016 | Sekretariat DPRD |
| 96 | Filling Besi/Metal | 4,00 | Unit | 1.175.000 | 1.175.000 | Pengadaan APBD | 01/09/2021 | Sekretariat DPRD |
| 97 | Filling Besi/Metal | 1,00 | Unit | 26.441.000 | 26.441.000 | Pengadaan APBD | 01/09/2021 | Sekretariat DPRD |
| 98 | **ALAT PEMBERSIH** | **21,00** | | | **81.572.500** | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 1,00 | Unit | 3.272.500 | 3.272.500 | Pengadaan APBD | 31/12/2001 | Sekretariat DPRD |
| 100 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 12,00 | Unit | 2.950.000 | 2.950.000 | Pengadaan APBD | 28/07/2016 | Sekretariat DPRD |
| 101 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 2,00 | Unit | 3.750.000 | 3.750.000 | Pengadaan APBD | 27/03/2023 | Sekretariat DPRD |
| 102 | Alat Pembersih Lain-lain | 6,00 | Unit | 5.900.000 | 5.900.000 | Pengadaan APBD | 28/07/2016 | Sekretariat DPRD |
| 103 | **ALAT PENDINGIN** | **71,00** | | | **938.588.500** | | | |
| 104 | Lemari Es | 5,00 | Unit | 2.750.000 | 2.750.000 | Pengadaan APBD | 10/06/2011 | Sekretariat DPRD |
| 105 | Lemari Es | 1,00 | Unit | 7.815.500 | 7.815.500 | Pengadaan APBD | 15/12/2016 | Sekretariat DPRD |
| 106 | A.C. Window | 37,00 | Unit | 8.950.000 | 8.950.000 | Pengadaan APBD | 31/12/2011 | Sekretariat DPRD |
| 107 | A.C. Window | 4,00 | Unit | 28.875.000 | 28.875.000 | Pengadaan APBD | 04/02/2013 | Sekretariat DPRD |
| 108 | A.C. Window | 2,00 | Unit | 34.077.000 | 34.077.000 | Pengadaan APBD | 04/03/2024 | Sekretariat DPRD |
| 109 | A.C. Split | 2,00 | Unit | 8.250.000 | 8.250.000 | Pengadaan APBD | 30/09/2016 | Sekretariat DPRD |
| 110 | A.C. Split | 5,00 | Unit | 9.324.000 | 9.324.000 | Pengadaan APBD | 13/10/2022 | Sekretariat DPRD |
| 111 | A.C. Split | 4,00 | Unit | 18.259.500 | 18.259.500 | Pengadaan APBD | 28/11/2023 | Sekretariat DPRD |
| 112 | A.C. Split | 6,00 | Unit | 17.148.500 | 17.148.500 | Pengadaan APBD | 04/03/2024 | Sekretariat DPRD |
| 113 | A.C. Unit | 5,00 | Unit | 32.634.000 | 32.634.000 | Pengadaan APBD | 28/11/2023 | Sekretariat DPRD |
| 114 | **ALAT DAPUR** | **7,00** | | | **77.968.700** | | | |
| 115 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 2,00 | Unit | 2.150.000 | 2.150.000 | Pengadaan APBD | 23/12/2021 | Sekretariat DPRD |
| 116 | Kitchen Set | 2,00 | Unit | 15.510.000 | 15.510.000 | Pengadaan APBD | 18/08/2021 | Sekretariat DPRD |
| 117 | Kitchen Set | 1,00 | Paket | 31.080.000 | 31.080.000 | Pengadaan APBD | 24/06/2024 | Sekretariat DPRD |
| 118 | Tabung Gas | 1,00 | Unit | 1.056.000 | 1.056.000 | Pengadaan APBD | 23/12/2021 | Sekretariat DPRD |
| 119 | lain-lain Alat Dapur | 1,00 | Unit | 10.512.700 | 10.512.700 | Pengadaan APBD | 07/11/2016 | Sekretariat DPRD |
| 120 | **ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)** | **444,00** | | | **185.665.503.367** | | | |
| 121 | Televisi | 2,00 | Unit | 1.387.500 | 1.387.500 | Pengadaan APBD | 31/12/2002 | Sekretariat DPRD |
| 122 | Televisi | 4,00 | Unit | 8.800.000 | 8.800.000 | Pengadaan APBD | 04/02/2013 | Sekretariat DPRD |
| 123 | Televisi | 1,00 | Unit | 12.000.000 | 12.000.000 | Pengadaan APBD | 18/11/2013 | Sekretariat DPRD |
| 124 | Televisi | 3,00 | Unit | 3.976.000 | 3.976.000 | Pengadaan APBD | 11/09/2015 | Sekretariat DPRD |
| 125 | Televisi | 1,00 | Unit | 9.900.000 | 9.900.000 | Pengadaan APBD | 28/07/2016 | Sekretariat DPRD |
| 126 | Televisi | 3,00 | Unit | 12.500.000 | 12.500.000 | Pengadaan APBD | 27/10/2016 | Sekretariat DPRD |
| 127 | Televisi | 1,00 | Unit | 12.830.000 | 12.830.000 | Pengadaan APBD | 30/07/2020 | Sekretariat DPRD |
| 128 | Televisi | 1,00 | Unit | 7.200.000 | 7.200.000 | Pengadaan APBD | 10/11/2022 | Sekretariat DPRD |
| 129 | Televisi | 2,00 | Unit | 11.000.000 | 11.000.000 | Pengadaan APBD | 13/11/2023 | Sekretariat DPRD |
| 130 | Loudspeaker | 4,00 | Unit | 116.549.397 | 116.549.397 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 131 | Loudspeaker | 4,00 | Unit | 1.753.049.397 | 1.753.049.397 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 132 | Loudspeaker | 2,00 | Unit | 2.174.049.397 | 2.174.049.397 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 133 | Loudspeaker | 1,00 | Unit | 2.996.549.397 | 2.996.549.397 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 134 | Loudspeaker | 8,00 | Unit | 3.465.000 | 3.465.000 | Pengadaan APBD | 09/07/2021 | Sekretariat DPRD |
| 135 | Sound System | 1,00 | Unit | 4.622.200 | 4.622.200 | Pengadaan APBD | 17/10/2012 | Sekretariat DPRD |
| 136 | Sound System | 2,00 | Unit | 14.300.000 | 14.300.000 | Pengadaan APBD | 14/11/2013 | Sekretariat DPRD |
| 137 | Sound System | 1,00 | Unit | 22.550.000 | 22.550.000 | Pengadaan APBD | 14/11/2013 | Sekretariat DPRD |
| 138 | Wireless | 1,00 | Unit | 3.800.000 | 3.800.000 | Pengadaan APBD | 02/11/2011 | Sekretariat DPRD |
| 139 | Microphone | 1,00 | Unit | 187.275.000 | 187.275.000 | Pengadaan APBD | 28/01/2013 | Sekretariat DPRD |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Microphone | 20,00 | Unit | 2.475.000 | 2.475.000 | Pengadaan APBD | 09/07/2021 | Sekretariat DPRD |
| 141 | Microphone Table Stand | 64,00 | Unit | 8.898.000 | 8.898.000 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 142 | Mic Conference | 10,00 | Unit | 5.775.000 | 5.775.000 | Pengadaan APBD | 17/10/2012 | Sekretariat DPRD |
| 143 | Camera Video | 1,00 | Unit | 13.875.000 | 13.875.000 | Pengadaan APBD | 25/08/2015 | Sekretariat DPRD |
| 144 | Lambang Garuda Pancasila | 1,00 | Unit | 2.550.000 | 2.550.000 | Pengadaan APBD | 14/12/2020 | Sekretariat DPRD |
| 145 | Gambar Presiden/Wakil Presiden | 4,00 | Unit | 380.000 | 380.000 | Pengadaan APBD | 22/09/2020 | Sekretariat DPRD |
| 146 | Tiang Bendera | 4,00 | Unit | 2.300.000 | 2.300.000 | Pengadaan APBD | 14/12/2020 | Sekretariat DPRD |
| 147 | Tangga Aluminium | 1,00 | Unit | 892.000 | 892.000 | Pengadaan APBD | 24/12/2014 | Sekretariat DPRD |
| 148 | Tangga Aluminium | 1,00 | Unit | 1.226.500 | 1.226.500 | Pengadaan APBD | 24/12/2014 | Sekretariat DPRD |
| 149 | Tangga Aluminium | 1,00 | Unit | 4.000.000 | 4.000.000 | Pengadaan APBD | 27/03/2023 | Sekretariat DPRD |
| 150 | Dispenser | 3,00 | Unit | 3.750.000 | 3.750.000 | Pengadaan APBD | 17/11/2022 | Sekretariat DPRD |
| 151 | Dispenser | 2,00 | Unit | 4.500.000 | 4.500.000 | Pengadaan APBD | 13/09/2024 | Sekretariat DPRD |
| 152 | Dispenser | 2,00 | Unit | 4.617.600 | 4.617.600 | Pengadaan APBD | 11/06/2024 | Sekretariat DPRD |
| 153 | Handy Cam | 4,00 | Unit | 13.752.200 | 13.752.200 | Pengadaan APBD | 16/06/2015 | Sekretariat DPRD |
| 154 | Karpet | 5,00 | Unit | 24.434.400 | 24.434.400 | Pengadaan APBD | 23/08/2016 | Sekretariat DPRD |
| 155 | Karpet | 1,00 | Unit | 138.061.000 | 138.061.000 | Pengadaan APBD | 18/12/2017 | Sekretariat DPRD |
| 156 | Karpet | 98,00 | Meter | 588.300 | 588.300 | Pengadaan APBD | 22/11/2022 | Sekretariat DPRD |
| 157 | Gordyin/Kray | 114,00 | Unit | 214.000 | 214.000 | Pengadaan APBD | 20/12/2012 | Sekretariat DPRD |
| 158 | Gordyin/Kray | 1,00 | Unit | 48.262.500 | 48.262.500 | Pengadaan APBD | 04/02/2013 | Sekretariat DPRD |
| 159 | Gordyin/Kray | 1,00 | Unit | 49.400.000 | 49.400.000 | Pengadaan APBD | 04/12/2014 | Sekretariat DPRD |
| 160 | Gordyin/Kray | 56,00 | Unit | 654.500 | 654.500 | Pengadaan APBD | 23/08/2021 | Sekretariat DPRD |
| 161 | Handtruck Troly Plastics | 2,00 | Unit | 1.180.000 | 1.180.000 | Pengadaan APBD | 02/12/2016 | Sekretariat DPRD |
| 162 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | Unit | 535.000 | 535.000 | Pengadaan APBD | 08/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 163 | Handtruck Troly Plastics | 2,00 | Unit | 1.112.000 | 1.112.000 | Pengadaan APBD | 08/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 164 | Mesin Potong Rumput | 2,00 | Unit | 4.925.000 | 4.925.000 | Pengadaan APBD | 15/11/2023 | Sekretariat DPRD |
| 165 | **ALAT PEMADAM KEBAKARAN** | **1,00** | | | **5.280.000** | | | |
| 166 | Lain-lain Alat Pemadam Kebakaran | 1,00 | Unit | 5.280.000 | 5.280.000 | Pengadaan APBD | 09/12/2020 | Sekretariat DPRD |
| 167 | **MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT** | **279,00** | | | **1.161.560.000** | | | |
| 168 | **MEJA KERJA PEJABAT** | **42,00** | | | **239.760.000** | | | |
| 169 | Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD | 4,00 | Unit | 11.150.000 | 11.150.000 | Pengadaan APBD | 07/02/2013 | Sekretariat DPRD |
| 170 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 3,00 | Unit | 7.000.000 | 7.000.000 | Pengadaan APBD | 31/12/2011 | Sekretariat DPRD |
| 171 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 15,00 | Unit | 2.475.000 | 2.475.000 | Pengadaan APBD | 14/05/2012 | Sekretariat DPRD |
| 172 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 2,00 | Unit | 3.450.000 | 3.450.000 | Pengadaan APBD | 14/05/2012 | Sekretariat DPRD |
| 173 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1,00 | Unit | 4.750.000 | 4.750.000 | Pengadaan APBD | 14/05/2012 | Sekretariat DPRD |
| 174 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1,00 | Unit | 22.770.000 | 22.770.000 | Pengadaan APBD | 16/11/2020 | Sekretariat DPRD |
| 175 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 1,00 | Unit | 64.515.000 | 64.515.000 | Pengadaan APBD | 02/09/2020 | Sekretariat DPRD |
| 176 | Lain-lain Meja Kerja Pejabat | 14,00 | Unit | 2.475.000 | 2.475.000 | Pengadaan APBD | 14/05/2012 | Sekretariat DPRD |
| 177 | Lain-lain Meja Kerja Pejabat | 1,00 | Unit | 3.450.000 | 3.450.000 | Pengadaan APBD | 14/06/2012 | Sekretariat DPRD |
| 178 | **MEJA RAPAT PEJABAT** | **32,00** | | | **95.040.000** | | | |
| 179 | Lain-lain Meja Rapat | 30,00 | Unit | 2.970.000 | 2.970.000 | Pengadaan APBD | 11/12/2017 | Sekretariat DPRD |
| 180 | **KURSI KERJA PEJABAT** | **39,00** | | | **267.915.000** | | | |
| 181 | Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD | 5,00 | Unit | 11.110.000 | 11.110.000 | Pengadaan APBD | 21/04/2017 | Sekretariat DPRD |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1,00 | Unit | 150.865.000 | 150.865.000 | Pengadaan APBD | 17/11/2015 | Sekretariat DPRD |
| 183 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 3,00 | Unit | 5.500.000 | 5.500.000 | Pengadaan APBD | 04/05/2017 | Sekretariat DPRD |
| 184 | Kursi Kerja | 30,00 | Unit | 1.500.000 | 1.500.000 | Pengadaan APBD | 14/05/2012 | Sekretariat DPRD |
| 185 | **KURSI RAPAT PEJABAT** | **115,00** | | | **274.630.000** | | | |
| 186 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II | 1,00 | Unit | 1.500.000 | 1.500.000 | Pengadaan APBD | 14/05/2012 | Sekretariat DPRD |
| 187 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III | 40,00 | Unit | 3.107.500 | 3.107.500 | Pengadaan APBD | 12/04/2017 | Sekretariat DPRD |
| 188 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf | 50,00 | Unit | 1.485.000 | 1.485.000 | Pengadaan APBD | 21/04/2017 | Sekretariat DPRD |
| 189 | **KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT** | **47,00** | | | **265.815.000** | | | |
| 190 | Kursi Tamu di Ruangan Ketua/Wakil Ketua DPRD | 24,00 | Unit | 3.850.000 | 3.850.000 | Pengadaan APBD | 27/04/2016 | Sekretariat DPRD |
| 191 | Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 6,00 | Unit | 4.702.500 | 4.702.500 | Pengadaan APBD | 03/05/2017 | Sekretariat DPRD |
| 192 | Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 6,00 | Unit | 4.840.000 | 4.840.000 | Pengadaan APBD | 03/05/2017 | Sekretariat DPRD |
| 193 | Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 11,00 | Unit | 10.560.000 | 10.560.000 | Pengadaan APBD | 03/05/2017 | Sekretariat DPRD |
| 194 | **LEMARI DAN ARSIP PEJABAT** | **4,00** | | | **18.400.000** | | | |
| 195 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1,00 | Unit | 8.800.000 | 8.800.000 | Pengadaan APBD | 18/11/2015 | Sekretariat DPRD |
| 196 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 3,00 | Unit | 3.200.000 | 3.200.000 | Pengadaan APBD | 18/11/2022 | Sekretariat DPRD |
| 197 | **PERALATAN STUDIO AUDIO** | **103,00** | | | **140.410.945.828** | | | |
| 198 | Audio Amplifier | 1,00 | Unit | 46.648.000 | 46.648.000 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 199 | Audio Monitor Active | 1,00 | Unit | 20.350.000 | 20.350.000 | Pengadaan APBD | 14/11/2013 | Sekretariat DPRD |
| 200 | Intercom Unit | 6,00 | Unit | 615.000 | 615.000 | Pengadaan APBD | 18/11/2013 | Sekretariat DPRD |
| 201 | Intercom Unit | 4,00 | Unit | 750.000 | 750.000 | Pengadaan APBD | 18/11/2013 | Sekretariat DPRD |
| 202 | Intercom Unit | 1,00 | Unit | 2.985.000 | 2.985.000 | Pengadaan APBD | 18/11/2013 | Sekretariat DPRD |
| 203 | Intercom Unit | 2,00 | Unit | 3.825.000 | 3.825.000 | Pengadaan APBD | 18/11/2013 | Sekretariat DPRD |
| 204 | Intercom Unit | 1,00 | Unit | 9.150.000 | 9.150.000 | Pengadaan APBD | 18/11/2013 | Sekretariat DPRD |
| 205 | Microphone/Wireless MIC | 2,00 | Unit | 8.250.000 | 8.250.000 | Pengadaan APBD | 14/11/2013 | Sekretariat DPRD |
| 206 | Microphone/Wireless MIC | 2,00 | Unit | 691.549.397 | 691.549.397 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 207 | Proyektor + Attachment | 1,00 | Unit | 744.700.000 | 744.700.000 | Pengadaan APBD | 21/10/2016 | Sekretariat DPRD |
| 208 | Proyektor + Attachment | 2,00 | Unit | 116.549.397 | 116.549.397 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 209 | Proyektor + Attachment | 64,00 | Unit | 1.988.000 | 1.988.000 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 210 | Proyektor + Attachment | 2,00 | Unit | 2.818.000 | 2.818.000 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 211 | Proyektor + Attachment | 2,00 | Unit | 296.549.397 | 296.549.397 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 212 | Proyektor + Attachment | 2,00 | Unit | 4.188.000 | 4.188.000 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 213 | Proyektor + Attachment | 1,00 | Unit | 3.791.549.446 | 3.791.549.446 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 214 | Peralatan Studio Audio Lainnya | 9,00 | Unit | 38.776.000 | 38.776.000 | Pengadaan APBD | 15/10/2024 | Sekretariat DPRD |
| 215 | **PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM** | **7,00** | | | **11.731.749.397** | | | |
| 216 | Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film) | 1,00 | Unit | 316.549.397 | 316.549.397 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 217 | Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film) | 1,00 | Unit | 33.668.000 | 33.668.000 | Pengadaan APBD | 27/11/2017 | Sekretariat DPRD |
| 218 | Tripod Camera | 1,00 | Unit | 3.100.000 | 3.100.000 | Pengadaan APBD | 10/11/2022 | Sekretariat DPRD |
| 219 | Camera Film | 1,00 | Unit | 12.729.000 | 12.729.000 | Pengadaan APBD | 04/06/2014 | Sekretariat DPRD |
| 220 | Camera Film | 1,00 | Unit | 16.755.000 | 16.755.000 | Pengadaan APBD | 05/10/2022 | Sekretariat DPRD |
| 221 | Layar Film/Projector | 1,00 | Unit | 25.400.000 | 25.400.000 | Pengadaan APBD | 12/12/2019 | Sekretariat DPRD |
| 222 | Video Conference | 1,00 | Unit | 22.500.000 | 22.500.000 | Pengadaan APBD | 10/11/2022 | Sekretariat DPRD |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | **PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH** | **1,00** | | | **10.312.000** | | | |
| 224 | Telescope (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah) | 1,00 | Unit | 10.312.000 | 10.312.000 | Pengadaan APBD | 16/06/2015 | Sekretariat DPRD |
| 225 | **ALAT STUDIO LAINNYA** | **1,00** | | | **35.618.880** | | | |
| 226 | Alat Studio Lain-lain | 1,00 | Unit | 35.618.880 | 35.618.880 | Pengadaan APBD | 09/07/2021 | Sekretariat DPRD |
| 227 | **ALAT KOMUNIKASI** | **15,00** | | | **60.100.000** | | | |
| 228 | **ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE** | **15,00** | | | **60.100.000** | | | |
| 229 | Handy Talky (HT) | 15,00 | Unit | 6.020.000 | 6.020.000 | Pengadaan APBD | 27/11/2020 | Sekretariat DPRD |
| 230 | **ALAT LABORATORIUM KIMIA** | **1,00** | | | **6.650.000** | | | |
| 231 | TV Monitor | 1,00 | Unit | 6.650.000 | 6.650.000 | Pengadaan APBD | 27/11/2020 | Sekretariat DPRD |
| 232 | **ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN** | **1,00** | | | **3.850.000** | | | |
| 233 | Portal Press | 1,00 | Unit | 3.850.000 | 3.850.000 | Pengadaan APBD | 11/12/2020 | Sekretariat DPRD |
| 234 | **MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC** | **1,00** | | | **9.950.000** | | | |
| 235 | Serial Scanner/Printer | 1,00 | Unit | 9.950.000 | 9.950.000 | Pengadaan APBD | 27/11/2020 | Sekretariat DPRD |
| 236 | **PERSONAL KOMPUTER** | **93,00** | | | **1.331.043.998** | | | |
| 237 | P.C Unit | 8,00 | Unit | 8.500.000 | 8.500.000 | Pengadaan APBD | 13/08/2015 | Sekretariat DPRD |
| 238 | P.C Unit | 1,00 | Unit | 15.000.000 | 15.000.000 | Pengadaan APBD | 28/07/2016 | Sekretariat DPRD |
| 239 | P.C Unit | 1,00 | Unit | 20.000.000 | 20.000.000 | Pengadaan APBD | 27/10/2016 | Sekretariat DPRD |
| 240 | P.C Unit | 4,00 | Unit | 18.150.000 | 18.150.000 | Pengadaan APBD | 20/04/2017 | Sekretariat DPRD |
| 241 | P.C Unit | 4,00 | Unit | 141.499.995 | 141.499.995 | Pengadaan APBD | 13/12/2021 | Sekretariat DPRD |
| 242 | Lap Top | 13,00 | Unit | 12.500.000 | 12.500.000 | Pengadaan APBD | 14/06/2012 | Sekretariat DPRD |
| 243 | Lap Top | 1,00 | Unit | 17.000.000 | 17.000.000 | Pengadaan APBD | 04/06/2014 | Sekretariat DPRD |
| 244 | Lap Top | 1,00 | Unit | 10.800.000 | 10.800.000 | Pengadaan APBD | 15/12/2014 | Sekretariat DPRD |
| 245 | Lap Top | 1,00 | Unit | 21.250.000 | 21.250.000 | Pengadaan APBD | 15/12/2014 | Sekretariat DPRD |
| 246 | Lap Top | 4,00 | Unit | 17.900.000 | 17.900.000 | Pengadaan APBD | 13/08/2015 | Sekretariat DPRD |
| 247 | Lap Top | 2,00 | Unit | 17.900.000 | 17.900.000 | Pengadaan APBD | 13/08/2015 | Sekretariat DPRD |
| 248 | Lap Top | 3,00 | Unit | 17.985.000 | 17.985.000 | Pengadaan APBD | 04/05/2017 | Sekretariat DPRD |
| 249 | Lap Top | 2,00 | Unit | 12.980.000 | 12.980.000 | Pengadaan APBD | 04/12/2017 | Sekretariat DPRD |
| 250 | Lap Top | 4,00 | Unit | 13.636.020 | 13.636.020 | Pengadaan APBD | 11/12/2017 | Sekretariat DPRD |
| 251 | Lap Top | 1,00 | Unit | 46.491.920 | 46.491.920 | Pengadaan APBD | 11/12/2017 | Sekretariat DPRD |
| 252 | Lap Top | 7,00 | Unit | 12.600.000 | 12.600.000 | Pengadaan APBD | 15/02/2018 | Sekretariat DPRD |
| 253 | Lap Top | 4,00 | Unit | 22.995.000 | 22.995.000 | Pengadaan APBD | 15/02/2018 | Sekretariat DPRD |
| 254 | Lap Top | 1,00 | Unit | 12.675.000 | 12.675.000 | Pengadaan APBD | 12/12/2019 | Sekretariat DPRD |
| 255 | Lap Top | 2,00 | Unit | 13.800.000 | 13.800.000 | Pengadaan APBD | 12/12/2019 | Sekretariat DPRD |
| 256 | Lap Top | 3,00 | Unit | 12.300.000 | 12.300.000 | Pengadaan APBD | 13/12/2021 | Sekretariat DPRD |
| 257 | Lap Top | 6,00 | Unit | 12.375.000 | 12.375.000 | Pengadaan APBD | 06/10/2022 | Sekretariat DPRD |
| 258 | Lap Top | 2,00 | Unit | 13.999.000 | 13.999.000 | Pengadaan APBD | 13/11/2023 | Sekretariat DPRD |
| 259 | Lap Top | 2,00 | Unit | 14.000.000 | 14.000.000 | Pengadaan APBD | 16/07/2024 | Sekretariat DPRD |
| 260 | Lap Top | 2,00 | Unit | 19.000.000 | 19.000.000 | Pengadaan APBD | 16/07/2024 | Sekretariat DPRD |
| 261 | Note Book | 10,00 | Unit | 12.200.000 | 12.200.000 | Pengadaan APBD | 18/11/2013 | Sekretariat DPRD |
| 262 | Tablet PC | 1,00 | Unit | 10.500.000 | 10.500.000 | Pengadaan APBD | 16/07/2024 | Sekretariat DPRD |
| 263 | lain-lain Personal Komputer | 1,00 | Unit | 9.147.000 | 9.147.000 | Pengadaan APBD | 14/06/2012 | Sekretariat DPRD |
| 264 | lain-lain Personal Komputer | 1,00 | Unit | 15.697.000 | 15.697.000 | Pengadaan APBD | 13/09/2016 | Sekretariat DPRD |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | lain-lain Personal Komputer | 1,00 | Unit | 16.996.000 | 16.996.000 | Pengadaan APBD | 13/09/2016 | Sekretariat DPRD |
| 266 | **KOMPUTER UNIT LAINNYA** | **3,00** | | | **49.425.000** | | | |
| 267 | Komputer Unit Lainnya | 1,00 | Unit | 17.800.000 | 17.800.000 | Pengadaan APBD | 17/06/2020 | Sekretariat DPRD |
| 268 | Komputer Unit Lainnya | 1,00 | Unit | 13.800.000 | 13.800.000 | Pengadaan APBD | 27/11/2020 | Sekretariat DPRD |
| 269 | Komputer Unit Lainnya | 1,00 | Unit | 17.825.000 | 17.825.000 | Pengadaan APBD | 27/11/2020 | Sekretariat DPRD |
| 271 | **PERALATAN MAINFRAME** | **5,00** | | | **4.500.000** | | | |
| 272 | Hard Disk | 5,00 | Unit | 900.000 | 900.000 | Pengadaan APBD | 12/11/2024 | Sekretariat DPRD |
| 273 | **PERALATAN PERSONAL KOMPUTER** | **76,00** | | | **318.420.678** | | | |
| 274 | Monitor | 5,00 | Unit | 1.350.000 | 1.350.000 | Pengadaan APBD | 10/06/2011 | Sekretariat DPRD |
| 275 | Monitor | 4,00 | Unit | 2.850.000 | 2.850.000 | Pengadaan APBD | 10/06/2011 | Sekretariat DPRD |
| 276 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 5,00 | Unit | 850.000 | 850.000 | Pengadaan APBD | 10/06/2011 | Sekretariat DPRD |
| 277 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 5,00 | Unit | 950.000 | 950.000 | Pengadaan APBD | 10/06/2011 | Sekretariat DPRD |
| 278 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 15,00 | Unit | 6.430.000 | 6.430.000 | Pengadaan APBD | 05/06/2013 | Sekretariat DPRD |
| 279 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 4,00 | Unit | 2.000.000 | 2.000.000 | Pengadaan APBD | 13/08/2015 | Sekretariat DPRD |
| 280 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2,00 | Unit | 2.900.000 | 2.900.000 | Pengadaan APBD | 04/12/2017 | Sekretariat DPRD |
| 281 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2,00 | Unit | 4.275.000 | 4.275.000 | Pengadaan APBD | 26/08/2019 | Sekretariat DPRD |
| 282 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2,00 | Unit | 2.600.000 | 2.600.000 | Pengadaan APBD | 17/06/2020 | Sekretariat DPRD |
| 283 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 4,00 | Unit | 2.100.000 | 2.100.000 | Pengadaan APBD | 13/12/2021 | Sekretariat DPRD |
| 284 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 5,00 | Unit | 28.000.006 | 28.000.006 | Pengadaan APBD | 13/12/2021 | Sekretariat DPRD |
| 285 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 6,00 | Unit | 3.600.000 | 3.600.000 | Pengadaan APBD | 05/10/2022 | Sekretariat DPRD |
| 286 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 5,00 | Unit | 3.500.000 | 3.500.000 | Pengadaan APBD | 27/03/2023 | Sekretariat DPRD |
| 287 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 4,00 | Unit | 3.450.000 | 3.450.000 | Pengadaan APBD | 04/09/2024 | Sekretariat DPRD |
| 288 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | Unit | 14.875.000 | 14.875.000 | Pengadaan APBD | 13/12/2019 | Sekretariat DPRD |
| 289 | External/ Portable Hardisk | 1,00 | Unit | 1.200.000 | 1.200.000 | Pengadaan APBD | 30/07/2021 | Sekretariat DPRD |
| 290 | Hard disk Eksternal | 1,00 | Unit | 7.000.000 | 7.000.000 | Pengadaan APBD | 18/11/2013 | Sekretariat DPRD |
| 291 | Hard disk Eksternal | 4,00 | Unit | 15.500.000 | 15.500.000 | Pengadaan APBD | 18/09/2015 | Sekretariat DPRD |
| 292 | Hard disk Eksternal | 1,00 | Unit | 6.895.675 | 6.895.675 | Pengadaan APBD | 24/10/2018 | Sekretariat DPRD |
| 293 | **PERALATAN KOMPUTER LAINNYA** | **1,00** | | | **11.322.000** | | | |
| 294 | Webcam | 1,00 | Unit | 11.322.000 | 11.322.000 | Pengadaan APBD | 23/03/2024 | Sekretariat DPRD |
| 295 | **PERALATAN PERMAINAN** | **1,00** | | | **1.162.500** | | | |
| 296 | Alat Tenis Meja | 1,00 | Unit | 1.162.500 | 1.162.500 | Pengadaan APBD | 31/12/2000 | Sekretariat DPRD |

## 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-Bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 2.3

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ***Renstra 2024-2029*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | - | - | - | 88,25 | 89,00 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 88,5 | 89,75 | 89,5 | 89,5 | 90 | 1,08 | 1 | 1,05 | 1,05 | 1,06 |

*Sumber: Data Capaian Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024*

Adapun yang menjadi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap pencapaian data diatas adalah:

## Tabel 2.4

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | 5.270.674.930,00 | | | | | 4.558.063.762,00 | | | | | | | | | |
| Pelayanan Managemen Kepegawaian | 918.403.400,00 | | | | | 759.631.739,00 | | | | | | | | | |
| Penyusun perencanaan dan pelaporan | 43.195.500,00 | | | | | 26.340.000,00 | | | | | | | | | |
| Penatausahaan dan pelaporan keuangan | 18.013.000,00 | | | | | 102.150.000,00 | | | | | | | | | |
| Pelayanan Administrasi Umum | 4.191.063.030,00 | | | | | 3.669.942.023,00 | | | | | | | | | |
| **Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** | **23.911.598.000,00** | | | | | **22.232.867.368,00** | | | | | **82,71%** | | | | |
| Fasilitasi penyusunan perundang-undangan | 134.706.000,00 | | | | | 94.546.500,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasilitasi Rapat dan Penyusunan Risalah | 728.316.000,00 | | | | | 589.530.000,00 | | | | | | | | | |
| Keprotokolan | 23.048.576.000,00 | | | | | 21.548.790.868,00 | | | | | | | | | |
| **Program Humas dan Publikasi** | **5.977.482.200,00** | | | | | **5.771.811.600,00** | | | | | **84,84%** | | | | |
| Publikasi Informasi | 5.629.725.000,00 | | | | | 278.766.000,00 | | | | | | | | | |
| Humas dan Layanan Aspirasi | 287.450.000,00 | | | | | 5.454.045.600,00 | | | | | | | | | |
| Dokumentasi dan Perpustakaan | 60.307.200,00 | | | | | 39.000.000,00 | | | | | | | | | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **38.075.781.484** | **40.115.255.537** | | **42.804.694.678** | | | | | | | | | | **40352128245** |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasl Klnerja | | 43.134.000 | 43.134.000 | | 94.740.000 | | | | | | | | | | 74825100 |
| Admlnlstrasl Keuangan Perangkat Daerah | | 2.888.600.878 | 2.866.622.880 | | 4.141.431.779 | | | | | | | | | | 3705072307 |
| Admlnlstrasl Kepegawalan Perangkat daerah | | 582.484.000 | 540.550.000 | | 324.349.800 | | | | | | | | | | 291793720 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 852.113.281 | 868.079.820 | | 464.397.300 | | | | | | | | | | 381804750 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 1.087.369.640 | 680.270.000 | | 4.370.084.000 | | | | | | | | | | 4182186450 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 3.232.588.019 | 3.207.818.831 | | 3.515.134.653 | | | | | | | | | | 2852811061 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 1.054.268.900 | 2.058.106.800 | | 1.842.733.970 | | | | | | | | | | 1554846209 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | 29.548.818.206 | 29.719.163.206 | | 27.405.600.826 | | | | | | | | | | 267200124 4 |
| Layanan Administrasi DPRD | | 93.130.000 | 131.510.000 | | 646.222.350 | | | | | | | | | | 588776200 |
| **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** | | **28.976.292.360** | **38.132.797.66 9** | | **39.818.238. 885** | | | | | | | | | | 385227790 0 9 |
| Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | 1.375.224.600 | 1.657.233.600 | | 527.134.000 | | | | | | | | | | 440334420 |
| Pembahasan Kebijakan Anggaran | | 577.744.700 | 5.088.347.200 | | 892.255.300 | | | | | | | | | | 684651622 |
| Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | 1.739.650.000 | 1.631.194.000 | | 150.630.000 | | | | | | | | | | 86640000 |
| Peningkatan Kapasitas DPRD | | 3.378.920.000 | 4.004.594.800 | | 4.069.823.2 00 | | | | | | | | | | 349814715 6 |
| Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | 4.081.220.000 | 5.150.910.000 | | 3.607.645.0 00 | | | | | | | | | | 351701800 0 |
| Fasilitasi Tugas DPRD | | 17.823.533.060 | 20.600.518.069 | | 30.570.751. 385 | | | | | | | | | | 302959878 1 1 |

*Sumber Data: Realisasi Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022, data diolah*

Berdasar Tabel 2.4 di atas dapat dilihat penggunaan anggaran yang tersedia tiap tahun akan tetap membawa dampak yang baik terhadap upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo sebagaimana dalam tujuan yaitu meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan kerukunan masyarakat. Upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan sinergitas dengan instansi tetap memerlukan dukungan anggaran. Pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah diharapkan mampu meminimalisir kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan meningkatkan partisipasi dalam politik yang pada akhirnya dapat mengantarkan pada kehidupan masyarakat Kabupaten Prbolinggo yang demokratis dan kondusif.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang memengaruhi target dan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Internal

- **Kekuatan *(Strengths)*:**

1) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2) Penyediaan anggaran kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo;
3) Adanya koordinasi yang baik antar semua pihak;

4) Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral;
5) Pengetahuan mendalam tentang prosedur DPRD: Pegawai Sekretariat umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang tata cara, aturan, dan prosedur DPRD.
6) Hubungan yang baik dengan anggota DPRD: Terjalin hubungan kerja yang baik antara Sekretariat dan anggota DPRD, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat berjalan lancar.
7) Akses terhadap informasi DPRD: Sekretariat memiliki akses langsung terhadap informasi-informasi penting terkait DPRD, seperti dokumen, data, dan keputusan.
8) Ketersediaan infrastruktur pendukung: Sekretariat umumnya dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, seperti ruang rapat, perpustakaan, dan peralatan kantor.
9) Pengalaman dalam penyelenggaraan kegiatan DPRD: Sekretariat memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan DPRD, seperti rapat paripurna, rapat komisi, dan kunjungan kerja.

- **Kelemahan *(Weakness) :***

1) Sumber daya manusia yang terbatas: Jumlah pegawai Sekretariat mungkin tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, sehingga dapat menghambat efektivitas kinerja.
2) Kurangnya inovasi: Beberapa kegiatan dan proses kerja di Sekretariat mungkin masih bersifat konvensional dan kurang memanfaatkan teknologi informasi.
3) Anggaran yang terbatas: Keterbatasan anggaran dapat membatasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.

4) Kurangnya kapasitas dalam pengembangan sistem informasi: Sekretariat mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi.
5) Kurangnya partisipasi masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di DPRD masih rendah. (Aduan Masyarakat dalam proses fasilitasi audiensi)

**2. Faktor Eksternal**

- **Peluang *(Opportunities)*:**

1) Perkembangan teknologi informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Sekretariat, seperti penggunaan sistem informasi manajemen persidangan, *e-office*, dan *website* yang interaktif.
2) Peningkatan partisipasi masyarakat: Sekretariat dapat mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, hearing publik, dan penggunaan media sosial.
3) Kerjasama dengan lembaga lain: Kerjasama dengan lembaga lain, seperti perguruan tinggi, LSM, dan pemerintah daerah, dapat memperkaya sumber daya dan memperluas jaringan.
4) Peningkatan kapasitas pegawai: Pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas kerja.
5) Implementasi e-government: Penerapan *e-government* dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan DPRD.

- **Ancaman *(Treaths)*:**

1) Perubahan regulasi: Perubahan peraturan perundang-undangan dapat berdampak pada tugas dan fungsi Sekretariat.
2) Perkembangan politik: Dinamika politik yang cepat dapat mempengaruhi kinerja DPRD dan Sekretariat.
3) Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi: Masyarakat semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik.
4) Persaingan antar lembaga: Persaingan antar lembaga dapat mempengaruhi alokasi anggaran dan sumber daya Sekretariat.

Berdasarkan analisis SWOT, maka alternatif strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo dapat dirumuskan sebagai berikut:

**A. Strategi Berdasarkan Kekuatan**

a. Memanfaatkan pengetahuan mendalam: Mengoptimalkan pengetahuan pegawai untuk meningkatkan kualitas layanan dan dukungan kepada anggota DPRD, seperti dalam penyusunan naskah akademik, analisis kebijakan, dan pendampingan kegiatan DPRD.
b. Memperkuat hubungan dengan anggota DPRD: Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan anggota DPRD untuk memastikan dukungan yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
c. Memanfaatkan akses informasi: Membuat database informasi yang terorganisir dan mudah diakses oleh anggota DPRD dan masyarakat.

d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia internal Sekretariat DPRD

**B. Strategi Mengatasi Kelemahan**

a. Peningkatan kapasitas SDM: Melaksanakan pelatihan dan pengembangan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai, terutama dalam bidang teknologi informasi, manajemen, dan komunikasi.
b. Inovasi proses kerja: Menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti *e-office,* sistem informasi manajemen persidangan, dan *website* yang interaktif.
c. Optimalisasi anggaran: Melakukan perencanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, serta mencari sumber pendanaan tambahan jika diperlukan.

**C. Strategi Memanfaatkan Peluang**

a. Transformasi digital: Melakukan transformasi digital secara bertahap dengan mengadopsi teknologi informasi yang relevan, seperti artificial intelligence dan big data analytics.
b. Peningkatan partisipasi masyarakat: Mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif, seperti forum diskusi, sosialisasi, dan hearing publik.
c. Kerjasama strategis: Membangun kemitraan dengan lembaga lain, seperti perguruan tinggi, LSM, dan pemerintah daerah, untuk mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

## D. Strategi Meminimalisir Ancaman

a. Adaptasi terhadap perubahan regulasi: Selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan melakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Sekretariat.
b. Penguatan komunikasi internal dan eksternal: Membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder untuk menjaga stabilitas dan sinergi.
c. Peningkatan ketahanan organisasi: Membangun sistem manajemen risiko yang baik untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman, seperti bencana alam dan pandemi.

# BAB III

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah adalah gambaran kondisi kinerja masa depan yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang lebih besar dan operasional yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Tujuan menjadi dasar untuk merumuskan sasaran yang lebih operasional dan target indikator kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra sangat penting karena menjadi panduan utama bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan strategis agar semua sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien demi mencapai hasil yang diinginkan.

## 3.2 Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasarn merupakan gambaran kinerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun sebagai penjabaran dari tujuan dan strategi pembangunan daerah. Sasaran ini menunjukkan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, yang disusun dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Adapun visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah :

**"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing"**

Sedangkan misi Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan dalam uraian berikut :

1. **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif (SAE Pemerintahan)**

   Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat sampai pada level pemerintahan desa. Yang dilakukan dengan memastikan kualitas aparatur organisasi pemerintah daerah yang kompeten prestasi, berkinerja dan loyal. Didukung dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. **Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang Kreatif dan Inovatif di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Berbasis Desa dan Komunitas Untuk Menciptakan Lapangan Kerja dan Memberantas Kemiskinan (SAE Ekonomi)**

   Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat memperkuat daya saing daerah terutama dalam meningkatkan nilai investasi, salah satunya melalui revitalisasi BUMD. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui peningkatan produktivitas para pelaku ekonomi maupun sektor-sektor unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, industri, dan perdagangan yang terstandarisasi secara global, berakar pada budaya lokal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. **Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan,**

**Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar lainnya yang Terjangkau (SAE Pendidikan dan Kesehatan)**

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat dilihat melalui angka Indeks Pembangunan Manusia, yang diukur melalui tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, membutuhkan komitmen dan kerjasama dari para pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melaksanakan program pengembangan karakter (religius dan berbudi pekerti luhur) bersama dengan Lembaga Pendidikan formal dan non formal berbasiskan agama dan kepercayaan secara bertahap dan terukur.

4. **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah Basis Produksi, Daerah Terluar, Daerah Terpencil, serta Perwilayahan Industri secara Merata (SAE Infrastruktur)**

Infrastruktur yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya. Infrastruktur yang kuat akan mempercepat respon pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan daerah seperti ketimpangan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pemerataan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan lapangan kerja.

**5. Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas (SAE Sosial)**

Peningkatan akses layanan publik yang inklusif dan responsif harus diwujudkan, khususnya bagi perempuan, masyarakat adat, pemuda, masyarakat rentan dan disabilitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang menegakkan keadilan sosial, dengan mendorong kesetaraan gender dan keberpihakan terhadap kelompok marginal dan rentan dapat diwujudkan baik dalam bentuk program maupun regulasi atau kebijakan. Dengan memberdayakan kelompok rentan, tidak hanya menyelesaikan persoalan ketidaksetaraan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah. Selain itu, dapat pula menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan harmonis, dengan memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama, sehingga terwujud masyarakat yang adil, inklusif, dan damai sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.

**CASCADING RPJMD KABUPATERN PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029**

| VISI / MISI | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Baseline | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| VISI: "Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing" | | | | | | | | | | |
| 1 MISI 1: SAE PEMERINTAHAN<br><br>Menciptakan tata kelola pemerintahan anti | 1 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional | | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 81,9 | 82,4 | 82,9 | 83,4 | 83,9 | 84,4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **korupsi, kolaboratif dan inovatif** | | | 3 | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | 3.2 Indeks kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,5 | 90,00 |

*Sumber data : Rankhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029*

Didalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029, Sekretariat DPRD masuk didalam Misi 1 yaitu SAE Pemerintahan "Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif" dengan Tujuan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional. Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah ini Sekretariat DPRD menetapkan sasaran jangka menengahnya yaitu Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 yang selaras dengan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pada Misi 1 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif (SAE Pemerintahan) membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat sampai pada level pemerintahan desa. Yang dilakukan dengan memastikan kualitas aparatur organisasi pemerintah daerah yang kompeten prestasi, berkinerja dan loyal. Didukung dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Fokus utama terlihat pada meningkatkan kualitas dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan cara memastikan kualitas aparatur organisasi pemerintah daerah yang kompeten prestasi, berkinerja dan loyal dan juga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan kedudukan Sekretariat DPRD yang merupakan unsur

pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD maka *Tujuan Sekretariat DPRD adalah Meningkatkan Kualitas layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD* dengan *Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada DPRD*. Perumusan Tujuan dan sasaran ini untuk memastikan bahwa Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

## 3.3 Strategi Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam konteks Permendagri Nomor 86 tahun 2017, strategi merupakan bagian penting dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Strategi ini menjadi jembatan antara visi dan misi yang bersifat umum dengan tujuan dan sasaran yang lebih spesifik. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam

serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

## 3.4 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan antara tujuan dan sasaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 yaitu *Meningkatnya kualitas pelayanan kepada DPRD*. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo**

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Meningkatnya Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD | 1. | Meningkatkan kulitas pelayanan | 1. | Peningkatan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia |
| | | | | 2. | Pemanfaatan Teknologi informasi |
| | | | | 3. | Keterbukaan saluran aspirasi masyarakat kepada DPRD. |
| | | | | 4. | Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pendukung |
| | | | | 5. | Penguatan Fungsi Dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6. | Membangun Sistem Tata Kelola yang Baik |

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran di atas selanjutnya menjadi pijakan dalam merumuskan program, kegiatan dan target kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan, maka disusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD sedapat mungkin harus mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

## TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
## RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD** | | | | | | | | | | | |
| - Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah<br>- Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional | | Nilai SAKIP (Nilai) | 67,11 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | |
| | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah | Nilai SAKIP (Nilai) | 67,11 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | |
| | | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,5 | 90,00 | 91,00 | |

Berikut cascading yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 disajikan :

**Cascading**
**Renstra Sekretariat DPRD**

# BAB IV

# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 4.1 Uraian Program

Dalam Permendagri 86 Tahun 2017, Program" adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama periode lima tahunan (RPJMD). Program-program ini berfungsi untuk mengarahkan kegiatan dan pengalokasian sumber daya guna mengatasi isu strategis, memenuhi kebutuhan daerah, dan memanfaatkan potensi daerah secara terarah dan berkelanjutan. Program-program ini merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode lima tahunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja program merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan sasaran tersebut

ditetapkan program-program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program yang dirumuskan berdasarkan pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, berikut disajikan dalam tabel 4.1 yang memuat program, outcome, indikator outcome serta target dan pagu indikatif :

## TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | 80.394.924.360 | | 82.858.193.461 | | 85.760.865.795 | | 87.616.470.078 | | 90.681.260.801 | |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 43.924.484.000 | | 45.259.616.000 | | 46.636.476.000 | | 48.056.459.000 | | 49.497.675.000 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | | | | 43.924.484.000 | | 45.259.616.000 | | 46.636.476.000 | | 48.056.459.000 | | 49.497.675.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | 36.470.440.360 | | 37.598.577.461 | | 39.124.389.795 | | 39.560.011.078 | | 41.183.585.801 | |
| Meningkatkan Kualitas Layanan Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD | | | | | 36.470.440.360 | | 37.598.577.461 | | 39.124.389.795 | | 39.560.011.078 | | 41.183.585.801 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 80394924360.00 | | 82858193461.00 | | 85760865795.00 | | 87616470078.00 | | 90681260801.00 | |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang ditetapkan dalam kegiatan terkait.

Program dan Kegiatan merupakan langkah operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan perlu disusun rencana kerja dan pendanaan. Rencana Kerja terdiri dari sub kegiatan-sub kegiatan dalam lingkup Kegiatan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tekhnik Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam table 4.2 berikut ini :

## TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
## RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD** | | | | | | | |
| - Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah<br>- Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional | | | | Nilai SAKIP (Nilai) | | |
| | | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah | | | Nilai SAKIP (Nilai) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 4.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 4.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 4.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | |
| | | | | | | 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | | Meningkatkan Kualitas Layanan Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program<br><br>Pembentukan Peraturan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD | |
| | | | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | |
| | | | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) | 4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan<br><br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah | |
| | | | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | |
| | | | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | 4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD | |
| | | | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | 4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | |
| | | | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses | |
| | | | | Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | |
| | | | | | | 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | |

## 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Dalam penyusunan Renstra tahun 2025–2029 Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo menggunakan 2 Program, 16 Kegiatan dan 70 Subkegiatan dalam rangka tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih, yang disajikan dalam tabel berikut :

## TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | 80.394.924.360 | | 82.858.193.461 | | 85.760.865.795 | | 87.616.470.078 | | 90.704.624.801 | | |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 43.924.484.000 | | 45.259.616.000 | | 46.636.476.000 | | 48.056.459.000 | | 49.521.039.000 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | | | 43.924.484.000 | | 45.259.616.000 | | 46.636.476.000 | | 48.056.459.000 | | 49.521.039.000 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD | |
| 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 110.068.000 | | 113.370.000 | | 116.772.000 | | 120.275.000 | | 123.882.000 | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | 2 | 110.068.000 | 2 | 113.370.000 | 2 | 116.772.000 | 2 | 120.275.000 | 2 | 123.882.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 74.068.000 | | 76.290.000 | | 78.579.000 | | 80.936.000 | | 83.364.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | 2 | 74.068.000 | 2 | 76.290.000 | 2 | 78.579.000 | 2 | 80.936.000 | 2 | 83.364.000 | | |
| 4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | 12.000.000 | | 12.360.000 | | 12.731.000 | | 13.113.000 | | 13.506.000 | | |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | 2 | 12.000.000 | 2 | 12.360.000 | 2 | 12.731.000 | 2 | 13.113.000 | 2 | 13.506.000 | | |
| 4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | 12.000.000 | | 12.360.000 | | 12.731.000 | | 13.113.000 | | 13.506.000 | | |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 12.000.000 | 2 | 12.360.000 | 2 | 12.731.000 | 2 | 13.113.000 | 2 | 13.506.000 | | |
| 4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12.000.000 | | 12.360.000 | | 12.731.000 | | 13.113.000 | | 13.506.000 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 6 | 6 | 12.000.000 | 6 | 12.360.000 | 6 | 12.731.000 | 6 | 13.113.000 | 6 | 13.506.000 | | |
| 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 4.686.840.000 | | 4.831.628.000 | | 4.980.967.000 | | 5.135.005.000 | | 5.293.895.000 | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 27 | 27 | 4.686.840.000 | 27 | 4.831.628.000 | 27 | 4.980.967.000 | 27 | 5.135.005.000 | 27 | 5.293.895.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | |
| 4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 4.471.376.000 | | 4.605.518.000 | | 4.743.683.000 | | 4.885.994.000 | | 5.032.573.000 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 27 | 27 | 4.471.376.000 | 27 | 4.605.518.000 | 27 | 4.743.683.000 | 27 | 4.885.994.000 | 27 | 5.032.573.000 | | |
| 4.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 209.064.000 | | 219.518.000 | | 230.494.000 | | 242.018.000 | | 254.119.000 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | | 48 | 209.064.000 | 48 | 219.518.000 | 48 | 230.494.000 | 48 | 242.018.000 | 48 | 254.119.000 | | |
| 4.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 6.400.000 | | 6.592.000 | | 6.790.000 | | 6.993.000 | | 7.203.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 6.400.000 | 1 | 6.592.000 | 1 | 6.790.000 | 1 | 6.993.000 | 1 | 7.203.000 | | |
| 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 264.220.000 | | 272.147.000 | | 280.312.000 | | 288.720.000 | | 297.381.000 | | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | 56 | 264.220.000 | 64 | 272.147.000 | 72 | 280.312.000 | 80 | 288.720.000 | 80 | 297.381.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 27 | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 27 | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | | |
| 4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 18.400.000 | | 18.952.000 | | 19.521.000 | | 20.106.000 | | 20.709.000 | | |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 27 | 27 | 18.400.000 | 27 | 18.952.000 | 27 | 19.521.000 | 27 | 20.106.000 | 27 | 20.709.000 | | |
| 4.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 12.000.000 | | 12.360.000 | | 12.731.000 | | 13.113.000 | | 13.506.000 | | |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 27 | 27 | 12.000.000 | 27 | 12.360.000 | 27 | 12.731.000 | 27 | 13.113.000 | 27 | 13.506.000 | | |
| 4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 233.820.000 | | 240.835.000 | | 248.060.000 | | 255.501.000 | | 263.166.000 | | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | 56 | 233.820.000 | 64 | 240.835.000 | 72 | 248.060.000 | 80 | 255.501.000 | 80 | 263.166.000 | | |
| 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 596.285.000 | | 615.524.000 | | 635.410.000 | | 655.961.000 | | 677.205.000 | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | 12 | 596.285.000 | 12 | 615.524.000 | 12 | 635.410.000 | 12 | 655.961.000 | 12 | 677.205.000 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | 48 | | 60 | | 72 | | 84 | | 84 | | | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 67.572.000 | | 70.950.000 | | 74.498.000 | | 78.223.000 | | 82.134.000 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | 12 | 67.572.000 | 12 | 70.950.000 | 12 | 74.498.000 | 12 | 78.223.000 | 12 | 82.134.000 | | |
| 4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 127.438.000 | | 131.261.000 | | 135.199.000 | | 139.255.000 | | 143.432.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | 12 | 127.438.000 | 12 | 131.261.000 | 12 | 135.199.000 | 12 | 139.255.000 | 12 | 143.432.000 | | |
| 4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 75.074.000 | | 77.326.000 | | 79.646.000 | | 82.035.000 | | 84.496.000 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | 12 | 75.074.000 | 12 | 77.326.000 | 12 | 79.646.000 | 12 | 82.035.000 | 12 | 84.496.000 | | |
| 4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 103.324.000 | | 106.424.000 | | 109.617.000 | | 112.905.000 | | 116.293.000 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | 12 | 103.324.000 | 12 | 106.424.000 | 12 | 109.617.000 | 12 | 112.905.000 | 12 | 116.293.000 | | |
| 4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 57.871.000 | | 59.607.000 | | 61.395.000 | | 63.237.000 | | 65.134.000 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | 12 | 57.871.000 | 12 | 59.607.000 | 12 | 61.395.000 | 12 | 63.237.000 | 12 | 65.134.000 | | |
| 4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 121.746.000 | | 125.398.000 | | 129.160.000 | | 133.035.000 | | 137.026.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | 48 | 121.746.000 | 60 | 125.398.000 | 72 | 129.160.000 | 84 | 133.035.000 | 84 | 137.026.000 | | |
| 4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 43.260.000 | | 44.558.000 | | 45.895.000 | | 47.271.000 | | 48.690.000 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | 6 | 43.260.000 | 6 | 44.558.000 | 6 | 45.895.000 | 6 | 47.271.000 | 6 | 48.690.000 | | |
| 4.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 1.723.087.000 | | 1.786.642.000 | | 1.853.501.000 | | 1.923.901.000 | | 1.998.101.000 | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 1 | 1.723.087.000 | 1 | 1.786.642.000 | 1 | 1.853.501.000 | 1 | 1.923.901.000 | 1 | 1.998.101.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | | |
| | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| 4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | | |
| 4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 199.471.000 | | 219.418.000 | | 241.360.000 | | 265.496.000 | | 292.045.000 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 50 | 199.471.000 | 50 | 219.418.000 | 50 | 241.360.000 | 50 | 265.496.000 | 50 | 292.045.000 | | |
| 4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.088.935.000 | | 1.121.603.000 | | 1.155.251.000 | | 1.189.908.000 | | 1.225.605.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 72 | 1.088.935.000 | 72 | 1.121.603.000 | 72 | 1.155.251.000 | 72 | 1.189.908.000 | 72 | 1.225.605.000 | | |
| 4.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 4.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 158.365.000 | | 163.116.000 | | 168.009.000 | | 173.050.000 | | 178.241.000 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 1 | 158.365.000 | 1 | 163.116.000 | 1 | 168.009.000 | 1 | 173.050.000 | 1 | 178.241.000 | | |
| 4.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 206.316.000 | | 212.505.000 | | 218.881.000 | | 225.447.000 | | 232.210.000 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 1 | 206.316.000 | 1 | 212.505.000 | 1 | 218.881.000 | 1 | 225.447.000 | 1 | 232.210.000 | | |
| 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 3.430.909.000 | | 3.533.837.000 | | 3.639.852.000 | | 3.749.047.000 | | 3.861.518.000 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | 12 | 3.430.909.000 | 12 | 3.533.837.000 | 12 | 3.639.852.000 | 12 | 3.749.047.000 | 12 | 3.861.518.000 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 905.092.000 | | 932.245.000 | | 960.212.000 | | 989.018.000 | | 1.018.689.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | 12 | 905.092.000 | 12 | 932.245.000 | 12 | 960.212.000 | 12 | 989.018.000 | 12 | 1.018.689.000 | | |
| 4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 59.504.000 | | 61.289.000 | | 63.128.000 | | 65.022.000 | | 66.972.000 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | 12 | 59.504.000 | 12 | 61.289.000 | 12 | 63.128.000 | 12 | 65.022.000 | 12 | 66.972.000 | | |
| 4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.466.313.000 | | 2.540.303.000 | | 2.616.512.000 | | 2.695.007.000 | | 2.775.857.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | 6 | 2.466.313.000 | 6 | 2.540.303.000 | 6 | 2.616.512.000 | 6 | 2.695.007.000 | 6 | 2.775.857.000 | | |
| 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 3.432.970.000 | | 3.535.961.000 | | 3.642.039.000 | | 3.751.299.000 | | 3.863.838.000 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 4 | 3.432.970.000 | 4 | 3.535.961.000 | 4 | 3.642.039.000 | 4 | 3.751.299.000 | 4 | 3.863.838.000 | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | 125 | | 125 | | 125 | | 125 | | 125 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | 118 | | 118 | | 118 | | 118 | | 118 | | | |
| 4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 601.192.000 | | 619.228.000 | | 637.805.000 | | 656.939.000 | | 676.647.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | 5 | 601.192.000 | 5 | 619.228.000 | 5 | 637.805.000 | 5 | 656.939.000 | 5 | 676.647.000 | | |
| 4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 468.551.000 | | 482.608.000 | | 497.086.000 | | 511.998.000 | | 527.358.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | 21 | 468.551.000 | 21 | 482.608.000 | 21 | 497.086.000 | 21 | 511.998.000 | 21 | 527.358.000 | | |
| 4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 150.000.000 | | 154.500.000 | | 159.135.000 | | 163.909.000 | | 168.826.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | 125 | 150.000.000 | 125 | 154.500.000 | 125 | 159.135.000 | 125 | 163.909.000 | 125 | 168.826.000 | | |
| 4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 231.008.000 | | 237.939.000 | | 245.077.000 | | 252.429.000 | | 260.002.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | 118 | 231.008.000 | 118 | 237.939.000 | 118 | 245.077.000 | 118 | 252.429.000 | 118 | 260.002.000 | | |
| 4.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.219.388.000 | | 1.255.970.000 | | 1.293.649.000 | | 1.332.458.000 | | 1.372.432.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 1 | 1.219.388.000 | 1 | 1.255.970.000 | 1 | 1.293.649.000 | 1 | 1.332.458.000 | 1 | 1.372.432.000 | | |
| 4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 512.831.000 | | 528.216.000 | | 544.062.000 | | 560.384.000 | | 577.196.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 4 | 512.831.000 | 4 | 528.216.000 | 4 | 544.062.000 | 4 | 560.384.000 | 4 | 577.196.000 | | |
| 4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 250.000.000 | | 257.500.000 | | 265.225.000 | | 273.182.000 | | 281.377.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 5 | 250.000.000 | 5 | 257.500.000 | 5 | 265.225.000 | 5 | 273.182.000 | 5 | 281.377.000 | | |
| 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | 29.680.105.000 | | 30.570.507.000 | | 31.487.623.000 | | 32.432.251.000 | | 33.405.219.000 | | |
| Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 50 | 50 | 29.680.105.000 | 50 | 30.570.507.000 | 50 | 31.487.623.000 | 50 | 32.432.251.000 | 50 | 33.405.219.000 | | |
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 0 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| 4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | 29.268.156.000 | | 30.146.200.000 | | 31.050.586.000 | | 31.982.104.000 | | 32.941.567.000 | | |
| Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 50 | 50 | 29.268.156.000 | 50 | 30.146.200.000 | 50 | 31.050.586.000 | 50 | 31.982.104.000 | 50 | 32.941.567.000 | | |
| 4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | 345.050.000 | | 355.402.000 | | 366.064.000 | | 377.045.000 | | 388.357.000 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 3 | 3 | 345.050.000 | 3 | 355.402.000 | 3 | 366.064.000 | 3 | 377.045.000 | 3 | 388.357.000 | | |
| 4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | 66.899.000 | | 68.905.000 | | 70.973.000 | | 73.102.000 | | 75.295.000 | | |
| Terlaksananya Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 0 | 50 | 66.899.000 | 50 | 68.905.000 | 50 | 70.973.000 | 50 | 73.102.000 | 50 | 75.295.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | 36.470.440.360 | | 37.598.577.461 | | 39.124.389.795 | | 39.560.011.078 | | 41.183.585.801 | | |
| Meningkatkan Kualitas Layanan Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD | | | | 36.470.440.360 | | 37.598.577.461 | | 39.124.389.795 | | 39.560.011.078 | | 41.183.585.801 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD | |
| 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | 1.191.058.000 | | 1.223.790.000 | | 1.257.504.000 | | 1.292.229.000 | | 1.327.996.000 | | |
| Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 4 | 4 | 1.191.058.000 | 4 | 1.223.790.000 | 4 | 1.257.504.000 | 4 | 1.292.229.000 | 4 | 1.327.996.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | - | | - | | - | | 1 | | - | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program<br><br>Pembentukan Peraturan Daerah | | | | 60.955.000 | | 62.784.000 | | 64.668.000 | | 66.608.000 | | 68.606.000 | | |
| Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | 60.955.000 | 1 | 62.784.000 | 1 | 64.668.000 | 1 | 66.608.000 | 1 | 68.606.000 | | |
| 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | 676.916.000 | | 697.223.000 | | 718.140.000 | | 739.684.000 | | 761.875.000 | | |
| Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 4 | 4 | 676.916.000 | 4 | 697.223.000 | 4 | 718.140.000 | 4 | 739.684.000 | 4 | 761.875.000 | | |
| 4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br><br>Naskah Akademik | | | | 353.187.000 | | 363.783.000 | | 374.696.000 | | 385.937.000 | | 397.515.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 4 | 4 | 353.187.000 | 4 | 363.783.000 | 4 | 374.696.000 | 4 | 385.937.000 | 4 | 397.515.000 | | |
| 4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| Tersusunnya Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | - | 100.000.000 | - | 100.000.000 | - | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | - | 100.000.000 | | |
| 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | 941.961.000 | | 970.219.000 | | 999.327.000 | | 1.029.307.000 | | 1.060.185.000 | | |
| Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 1 | 1 | 941.961.000 | 1 | 970.219.000 | 1 | 999.327.000 | 1 | 1.029.307.000 | 1 | 1.060.185.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS | | | | 161.239.000 | | 166.076.000 | | 171.059.000 | | 176.191.000 | | 181.476.000 | | |
| Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 1 | 1 | 161.239.000 | 1 | 166.076.000 | 1 | 171.059.000 | 1 | 176.191.000 | 1 | 181.476.000 | | |
| 4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | 161.239.000 | | 166.076.000 | | 171.059.000 | | 176.191.000 | | 181.476.000 | | |
| Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 1 | 1 | 161.239.000 | 1 | 166.076.000 | 1 | 171.059.000 | 1 | 176.191.000 | 1 | 181.476.000 | | |
| 4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD | | | | 269.678.000 | | 277.768.000 | | 286.101.000 | | 294.684.000 | | 303.525.000 | | |
| Terlaksananya Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 1 | 1 | 269.678.000 | 1 | 277.768.000 | 1 | 286.101.000 | 1 | 294.684.000 | 1 | 303.525.000 | | |
| 4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan | | | | 269.678.000 | | 277.768.000 | | 286.101.000 | | 294.684.000 | | 303.525.000 | | |
| Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 1 | 1 | 269.678.000 | 1 | 277.768.000 | 1 | 286.101.000 | 1 | 294.684.000 | 1 | 303.525.000 | | |
| 4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | 80.127.000 | | 82.531.000 | | 85.007.000 | | 87.557.000 | | 90.183.000 | | |
| Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 1 | 1 | 80.127.000 | 1 | 82.531.000 | 1 | 85.007.000 | 1 | 87.557.000 | 1 | 90.183.000 | | |
| 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 483.200.000 | | 507.360.000 | | 556.795.000 | | 559.362.000 | | 587.328.000 | | |
| Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 2 | 2 | 483.200.000 | 2 | 507.360.000 | 2 | 556.795.000 | 2 | 559.362.000 | 2 | 587.328.000 | | |
| | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 24 | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) | 24 | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 24 | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 24 | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | |
| 4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 100.800.000 | | 105.840.000 | | 111.132.000 | | 116.688.000 | | 122.522.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 24 | 48 | 100.800.000 | 48 | 105.840.000 | 48 | 111.132.000 | 48 | 116.688.000 | 48 | 122.522.000 | | |
| 4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | 100.800.000 | | 105.840.000 | | 135.199.000 | | 116.688.000 | | 122.522.000 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 24 | 48 | 100.800.000 | 48 | 105.840.000 | 48 | 135.199.000 | 48 | 116.688.000 | 48 | 122.522.000 | | |
| 4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | 100.800.000 | | 105.840.000 | | 111.132.000 | | 116.688.000 | | 122.522.000 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 24 | 48 | 100.800.000 | 48 | 105.840.000 | 48 | 111.132.000 | 48 | 116.688.000 | 48 | 122.522.000 | | |
| 4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | 100.800.000 | | 105.840.000 | | 111.132.000 | | 116.688.000 | | 122.522.000 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) | 24 | 48 | 100.800.000 | 48 | 105.840.000 | 48 | 111.132.000 | 48 | 116.688.000 | 48 | 122.522.000 | | |
| 4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | 32.000.000 | | 33.600.000 | | 35.280.000 | | 37.044.000 | | 38.896.000 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 2 | 2 | 32.000.000 | 2 | 33.600.000 | 2 | 35.280.000 | 2 | 37.044.000 | 2 | 38.896.000 | | |
| 4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | 48.000.000 | | 50.400.000 | | 52.920.000 | | 55.566.000 | | 58.344.000 | | |
| Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | | 1 | 48.000.000 | 1 | 50.400.000 | 1 | 52.920.000 | 1 | 55.566.000 | 1 | 58.344.000 | | |
| 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | 5.350.762.000 | | 5.538.645.000 | | 6.071.445.000 | | 5.532.613.000 | | 6.127.183.000 | | |
| Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 5.350.762.000 | 1 | 5.538.645.000 | 1 | 6.071.445.000 | 1 | 5.532.613.000 | 1 | 6.127.183.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | 36 | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
| | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 2 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 396 | 396 | | 396 | | 396 | | 396 | | 396 | | | |
| 4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD | | | | 0 | | 0 | | 700.000.000 | | 0 | | 0 | | |
| Terselenggaranya Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 1 | 700.000.000 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD | | | | 3.811.000.000 | | 3.925.330.000 | | 4.043.090.000 | | 4.164.383.000 | | 4.286.314.000 | | |
| Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 6 | 6 | 3.811.000.000 | 6 | 3.925.330.000 | 6 | 4.043.090.000 | 6 | 4.164.383.000 | 6 | 4.286.314.000 | | |
| 4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | 30.900.000 | | 31.827.000 | | 32.782.000 | | 33.765.000 | | 34.778.000 | | |
| Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 2 | 4 | 30.900.000 | 4 | 31.827.000 | 4 | 32.782.000 | 4 | 33.765.000 | 4 | 34.778.000 | | |
| 4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | 288.000.000 | | 324.000.000 | | 360.000 | | 396.000 | | 432.000.000 | | |
| Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 6 | 6 | 288.000.000 | 6 | 324.000.000 | 6 | 360.000 | 6 | 396.000 | 6 | 432.000.000 | | |
| 4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | 154.253.000 | | 158.880.000 | | 163.647.000 | | 168.556.000 | | 173.613.000 | | |
| Terselenggaranya Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | 36 | 36 | 154.253.000 | 36 | 158.880.000 | 36 | 163.647.000 | 36 | 168.556.000 | 36 | 173.613.000 | | |
| 4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | 61.862.000 | | 63.718.000 | | 65.629.000 | | 67.598.000 | | 69.626.000 | | |
| Tersusunnya Rencana Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 61.862.000 | 1 | 63.718.000 | 1 | 65.629.000 | 1 | 67.598.000 | 1 | 69.626.000 | | |
| 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | 1.004.747.000 | | 1.034.890.000 | | 1.065.937.000 | | 1.097.915.000 | | 1.130.852.000 | | |
| Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 396 | 396 | 1.004.747.000 | 396 | 1.034.890.000 | 396 | 1.065.937.000 | 396 | 1.097.915.000 | 396 | 1.130.852.000 | | |
| 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | 10.370.366.600 | | 10.681.477.518 | | 11.001.921.624 | | 11.331.979.762 | | 11.671.938.995 | | |
| Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | 1.712 | 1.712 | 10.370.366.600 | 1.712 | 10.681.477.518 | 1.712 | 11.001.921.624 | 1.712 | 11.331.979.762 | 1.712 | 11.671.938.995 | | |
| | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | 176.336.000 | | 181.626.000 | | 187.075.000 | | 192.687.000 | | 198.468.000 | | |
| Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | 1.712 | 1.712 | 176.336.000 | 1.712 | 181.626.000 | 1.712 | 187.075.000 | 1.712 | 192.687.000 | 1.712 | 198.468.000 | | |
| 4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | 51.600.000 | | 53.148.000 | | 54.742.000 | | 56.385.000 | | 58.076.000 | | |
| Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 3 | 3 | 51.600.000 | 3 | 53.148.000 | 3 | 54.742.000 | 3 | 56.385.000 | 3 | 58.076.000 | | |
| 4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses | | | | 10.142.430.600 | | 10.446.703.518 | | 10.760.104.624 | | 11.082.907.762 | | 11.415.394.995 | | |
| Terlaksananya Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 3 | 3 | 10.142.430.600 | 3 | 10.446.703.518 | 3 | 10.760.104.624 | 3 | 11.082.907.762 | 3 | 11.415.394.995 | | |
| 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD | | | | 18.133.092.760 | | 18.677.085.943 | | 19.237.397.171 | | 19.814.520.316 | | 20.408.954.806 | | |
| Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 1 | 1 | 18.133.092.760 | 1 | 18.677.085.943 | 1 | 19.237.397.171 | 1 | 19.814.520.316 | 1 | 20.408.954.806 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 60 | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 70 | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | | |
| 4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | 13.032.272.760 | | 13.423.240.943 | | 13.825.938.171 | | 14.240.716.316 | | 14.667.937.806 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 70 | 70 | 13.032.272.760 | 70 | 13.423.240.943 | 70 | 13.825.938.171 | 70 | 14.240.716.316 | 70 | 14.667.937.806 | | |
| 4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | 36.000.000 | | 37.080.000 | | 38.192.000 | | 39.338.000 | | 40.518.000 | | |
| Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 1 | 1 | 36.000.000 | 1 | 37.080.000 | 1 | 38.192.000 | 1 | 39.338.000 | 1 | 40.518.000 | | |
| 4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | 58.617.000 | | 60.376.000 | | 62.187.000 | | 64.053.000 | | 65.974.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | 12 | 12 | 58.617.000 | 12 | 60.376.000 | 12 | 62.187.000 | 12 | 64.053.000 | 12 | 65.974.000 | | |
| 4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | 5.006.203.000 | | 5.156.389.000 | | 5.311.080.000 | | 5.470.413.000 | | 5.634.525.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 60 | 60 | 5.006.203.000 | 60 | 5.156.389.000 | 60 | 5.311.080.000 | 60 | 5.470.413.000 | 60 | 5.634.525.000 | | |

## 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Setiap program dan kegiatan dalam rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo mengacu secara eksplisit pada indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo. Hal ini untuk memastikan bahwa visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yang diterjemahkan ke dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo terakomodasi secara linier dan implementatif melalui program-program Sekretariat DPRD.

Dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan analisis permasalahan dan tantangan, berikut adalah rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti.

1. Rekomendasi Program dan Kegiatan Prioritas

1. Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia :
   a. Program:
      - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
      - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.
   b. Kegiatan:
      - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang mewadahi pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bagi ASN.
      - Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang mewadahi pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD.
2. Keterbukaan saluran aspirasi masyarakat kepada DPRD :
   a. Program:
      - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.
   b. Kegiatan:

Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang mewadahi pelaksanaan Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

## 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD

Di dalam Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025–2029 terdapat sasaran strategis yang harus dicapai oleh Sekretaris DPRD. Untuk mencapai sasaran strategis ini diukur ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Nilai Sakip dan Indeks Kepuasan Masyarkat. Pengukuran kedua Indeks ini akan menjadi langkah awal yang sangat baik bagi Kabupaten Probolinggo selain saling melengkapi juga memberikan gambaran utuh tentang kondisi sosial di Kabupaten Probolinggo.

## TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
## RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD | | | | | | | | | |
| 2. | Nilai SAKIP | Nilai | 67,11 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | |
| 3. | Indeks kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,5 | 90,00 | 91,00 | |

# BAB V

# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029. Dokumen Renstra ini memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan serta Penetapan Indikator Kinerja pada tahun rencana 2025-2029.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, perangkat daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan daerah dalam kurun lima tahun disiapkan sebagai informasi tentang komitmen politik kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dalam pilkada tahun 2024. perencanaan diuraikan setiap lima tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan cita-cita, harapan, kebijakan yang dituangkan dalam program kepala daerah, termasuk kebijakan yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pengembangan regional, keuangan daerah, dan indikasi kerangka pendanaan pembangunan selama lima tahun. Seiring dengan pemilihan kepala regional simultan di semua wilayah otonom Indonesia pada tahun

2024, kepala daerah baru dipilih untuk periode dari tahun 2025 hingga 2029, menciptakan desain RPJMD baru untuk periode itu. Visi, misi, dan komitmen politik yang akan dilaksanakan tertuang dalam dokumen RPJMD, termasuk Kabupaten Probolinggo, untuk periode RPJMD 2025 hingga tahun 2029.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah. Pada Bab II Bagian Keempat Pasal 41 hingga Pasal 72 Permendagri 86/2017, dijelaskan bahwa tata cara penyusunan RPJMD yang terdiri dari enam tahap, yaitu persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan Rancangan Awal RPJMD, penyusunan Rancangan RPJMD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD, penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, dan penetapan Peraturan Daerah. Pada bulan Maret 2025, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi melalui Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tata cara penyusunan dokumen tersebut. Dijelaskan bahwa proses penyusunan diawali dengan tahap penyiapan yang meliputi pembentukan tim penyusun, pelaksanaan orientasi tim penyusun dan penyusunan agenda kerja tim, analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 tahun terakhir, dan inventarisasi data, informasi, dan hal lain yang diperlukan dalam proses penyusunan. Proses dilanjutkan dengan pembahasan teknokratik Visi Misi Kepala Daerah yang dilantik dan penulisan dokumen Rancangan Awal RPJMD sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

## 5.1 Pedoman Transisi

Panduan masa peralihan Kepala Daerah, akan digunakan sebagai panduan dan acuan untuk RKPD Tahun 2030. Masa peralihan atau transisi ini, dengan tujuan menjaga kesinambungan pembangunan. Pedoman yang

menjadi acuan umum pada saat periodisasi RPJMD ini berakhir ditetapkan sebagai berikut:

1. Permasalahan di Kabupaten Probolinggo yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD ini, maka permasalahan pembangunan tersebut juga menjadi bagian dari RPJMD periode selanjutnya, agar dapat dituangkan dan dilaksanakan dengan program-program pembangunan pada periode selanjutnya;
2. Program prioritas dan/atau program strategis daerah yang telah dilaksanakan pada periode RPJMD ini dan masih relevan / perlu dilanjutkan pada periode selanjutnya dan direkomendasikan untuk diakomodasi dalam RPJMD periode berikutnya, dengan tujuan memaksimalkan layanan pemerintah oleh masyarakat.

## 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan peralihan ini bertujuan untuk menyajikan berbagai hal penting terkait pelaksanaan perencanaan jangka menengah daerah dan menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas pembangunan, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan program. Tata cara pelaksanaan masa peralihan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perlu segera disusun dokumen perencanaan spasial baik di level makro (RTRW) maupun di level mikro (RDTR) untuk melihat relevansi pencapaian target kinerja dan intervensi program dalam RPJMD dengan sebaran data spasial. Dengan demikian strategi pencapaian target dapat lebih spesifik.
2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, agar melakukan koordinasi, baik pada tiap rumpun atau lintas rumpun (*Joint Outcomes*) untuk memastikan pencapaian *outcome* RPJMD berjalan dengan efektif dan efisien;

### 5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Mekanisme pengendalian melibatkan tim dari internal Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo seperti pelaksana urusan perencanaan dan pengawasan serta lembaga lain terkait untuk memantau progres, dengan evaluasi dilakukan setiap semester menggunakan indikator kinerja. Laporan kinerja disampaikan ke DPRD Kabupaten Probolinggo, dan hasil evaluasi menjadi dasar penyesuaian program. Untuk memastikan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025 – 2029 berjalan sesuai rencana, mekanisme pengendalian dan evaluasi meliputi: a) Jadwal evaluasi periodik, setiap triwulan atau tahunan, dengan laporan kemajuan disampaikan ke DPRD; b) Indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur pencapaian target, seperti capaian pembangunan infrastruktur, peningkatan IPM, atau penurunan angka kemiskinan; c) Mekanisme penyesuaian rencana berdasarkan hasil evaluasi, termasuk revisi program jika diperlukan; d) Pembentukan Tim Pengendali: Tim terdiri dari Bappeda, Inspektorat, dan perangkat daerah dan pihak lain terkait, dengan jadwal rapat bulanan untuk memantau progres dan tindak lanjutnya.

Demikian pedoman transisi, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Probolinggo, 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PROBOLINGGO

**YULIUS CHRISTIAN, S.I.P.,M.M.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19710723 199101 1 001

# RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH 2025-2029

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah dapat diselesaikan. Penyusunan RENSTRA ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra PD) tahun 2025-2029 menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam perumusannya, melalui tahapan, tata cara, serta pendekatan sebagaimana peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

Renstra ini digunakan sebagai pedoman bagi seluruh bagian dan pemangku kepentingan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan, agar lebih terarah, fokus dan terpadu bersama Perangakt Daerah lainnya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, serta bermanfaat sebagai salah satu metode evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, sehingga dapat mewujudkan Kepemerintahan yang baik.

Demikian dokumen ini tersusun dan semoga dokumen ini bermanfaat demi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 26 September 2025

**SEKRETARIS DEARAH**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**UGAS IRWANTO, S.Sos,. M.Si**
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR GAMBAR ..... iii

DAFTAR TABEL ..... iv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Landasan Hukum ..... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ..... 7
1.4. Sistematika Penulisan ..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 9

2.1 Struktur, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah ..... 9
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah ..... 19
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah ..... 27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD ..... 32
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD ..... 33
2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis ..... 46

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 50

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah ..... 50
3.2 Strategi Sekretariat Daerah Dalam Mencapai Tujua dan Sasaran ..... 58
3.3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah ..... 60

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 67

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif ..... 67
4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 131
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat Daerah ..... 132
4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ..... 133
4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah ..... 135

BAB V PENUTUP ..... 143

5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 143
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 143

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo .....18

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Kondisi Faktual dan Formasi Pegawai Sekretariat Daerah ..... 19
Tabel 2.2 Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan ..... 20
Tabel 2.3 Sebaran PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan ..... 21
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana di Lingkup Sekertariat Daerah ..... 22
Tabel 2.5 Sumberdaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekretariat Daerah ..... 25
Tabel 2.6 Sumberdaya Keuangan Sekretariat Daerah ..... 26
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Setda Tahun 2019-2023 ..... 29
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Utama ..... 30
Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah ..... 35
Tabel 3.0 Daftar Isu Strategis Yang Bersumber Dari Telaah ..... 49
Tabel 3.1 Penjabaran Tujuan Dalam Sasaran Dan Indikator Sasaran Serta Target Kinerja Sasaran Dalam 5 Tahun Mendatang ..... 53
Tabel 3.2 Definisi Operasional serta Formula Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran..... 55
Tabel 3.3 Penahapan Pembangunan..... 60
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra ..... 62
Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja ... 70
Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan..... 88
Tabel 4.3 Program , Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo..... 109
Tabel 4.4 Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 131
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo..... 134
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo..... 137
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo..... 139

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025-2029 dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris) dan Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi) yang telah di lantik pada tanggal 20 Februari 2025, menuangkan visi, misi, dan komitmen politik dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2025 hingga 2029.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel, dan transparan, Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo memegang peran strategis sebagai unsur pembantu pimpinan Kepala Daerah. Fungsi utama Sekretariat Daerah adalah sebagai motor penggerak koordinasi, fasilitasi, serta administrasi pemerintahan, yang menjembatani hubungan antara Kepala Daerah, perangkat daerah, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Sekretariat Daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 didasari oleh kebutuhan untuk menghadirkan arah kebijakan yang terukur dan sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil (*outcome*).

Secara khusus Sekretariat Daerah mendukung Misi ke-1 RPJMD SAE PEMERINTAHAN, yaitu *"Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif"*, menjadi acuan utama dalam perumusan strategi Sekretariat Daerah. Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kinerja birokrasi, transparansi pelayanan, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.

Renstra ini diharapkan menjadi instrumen yang memastikan setiap bagian di lingkungan Sekretariat Daerah berperan aktif dalam menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian integral dari implementasi reformasi birokrasi yang menuntut adanya perencanaan yang adaptif terhadap tantangan eksternal, seperti dinamika sosial-politik, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Dokumen ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 serta instruksi menteri dalam negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembagunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029, yang menjadi rujukan penting dalam penyusunan Renstra berbasis kinerja dan terintegrasi dengan penganggaran. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi juga merupakan dokumen pertanggungjawaban publik

terhadap alokasi anggaran dan capaian kinerja pemerintahan.

Penyusunan Renstra ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Daerah. Proses ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (2024–2026), termasuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan berbagai tantangan yang belum terselesaikan secara optimal. Refleksi atas capaian masa lalu menjadi bekal penting agar Renstra 2025–2029 lebih responsif terhadap tantangan dan peluang strategis di masa depan.

Arah kebijakan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun mendatang akan difokuskan pada beberapa prioritas utama, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, berintegritas, dan kolaboratif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip *good governance* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan, inventarisasi, dan verifikasi penerima hibah dan bantuan sosial berbasis data dan teknologi;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah dan layanan bantuan hukum untuk mendukung kepastian hukum dan efektivitas kebijakan;
4. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan daya saing daerah;
5. Menyusun program kerja berbasis elektronik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, akuntabel, tidak diskriminatif, kompetitif, adil dan transparan;
7. Memperkuat manajemen kepegawaian dan pelayanan administrasi ASN berbasis digital;
8. Mendorong efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan, memperkuat budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan publik prima;
9. Meningkatkan profesionalisme dalam layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, mendukung koordinasi yang efektif;
10. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penataan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD.

Melalui Renstra ini, diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sangat bergantung pada sinergi lintas perangkat daerah yang dikomandoi oleh peran koordinatif dan fasilitatif Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, program dan kegiatan dalam Renstra ini harus berorientasi pada pencapaian indikator kinerja yang terukur dan akuntabel.

Dengan latar belakang tersebut, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi landasan kokoh bagi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program prioritas, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) diselaraskan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta RPJMD, dengan sifat indikatif. Renstra PD menjawab tiga

pertanyaan dasar :

- Arah pengembangan pelayanan perangkat daerah dan capaian yang ditargetkan dalam lima tahun;
- Strategi pencapaian tujuan tersebut;
- Langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai target.

Sebagai konsekuensi logis dari peran strategis ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dituntut untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang berlandaskan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas tinggi, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sangat penting dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah di era globalisasi. Pada akhirnya, kinerja pelayanan publik yang baik akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Probolinggo ke depan

### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Regulasi untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017)

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;
39. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah yang sistematis, terukur, dan terarah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan peran strategis Sekretariat Daerah sebagai koordinator administratif pemerintahan dengan mengarah RPJMD Tahun 2025 - 2029, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas program/kegiatan Sekretariat Daerah secara terstruktur dan logis dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah;
2. Memberikan kerangka strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unit koordinatif, administratif, dan fasilitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, kolaboratif, dan berbasis kinerja;
4. Menjamin kesinambungan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pelayanan administratif, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, kepegawaian, hukum, organisasi, pengadaan barang/jasa, perekonomian SDA, protokoler serta hubungan antar lembaga;
5. Menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan perbaikan kinerja organisasi, baik internal maupun eksternal, secara periodik;
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja yang selaras dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyediakan data-data dan memuat informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo disertai

dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) Tahun Terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

2.1 Struktur, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

2.6 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

3.2 Strategi Sekretariat Daerah Dalam Mencapai Tujua dan Sasaran

3.3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat Daerah

4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

5.1 Kaidah Pelaksanaan

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1. Struktur, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

2.1.1. Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

Sesuai Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

**Susunan Organisasi** :

1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli terdiri atas :
   a) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan;
   b) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
   c) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
   a) Bagian Pemerintahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   b) Bagian Hukum membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   c) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
   a) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   b) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   c) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
   a) Bagian Umum membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   b) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
      1) Sub Bagian Protokol;
      2) Kelompok Jabatan Fungsional.
   c) Bagian Organisasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

**1. Sekretaris Daerah**

mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative dan mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. Staf Ahli**

mempunyai tugas memberikan kajian atau telaahan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dan fungsinya :

a. pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. pelaksanaan dan mendapat data serta informasi dari perangkat daerah dalam penyusunan telaahan staf sesuai dengan bidangnya;
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan hukum serta pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat dan mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
f. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretariat DPRD dan Kecamatan.
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

**3.1. Kepala Bagian Pemerintahan**

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah dan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama serta otonomi daerah;
f. pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah;
h. penyusunan, pelaksanaan, pengoordinasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
i. pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten.

**3.2. Kepala Bagian Hukum**

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi dan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
e. penyusunan, pelaksanaan, pengoordinasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
f. pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten.

**3.3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang bina mental spritual, kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial dan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang keagamaaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang keagamaaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
d. penyusunan, pelaksanaan, pengoordinasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
e. pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten.

**4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan dan mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian,pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan;
c. penyusunan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang dan jasa;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang dan jasa;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
f. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

**4.1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**

mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasiaan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi serta pelaporan dan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
b. dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi serta pelaporan;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi serta pelaporan;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi

pencapaian tujuan kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalin program dan evaluasi serta pelaporan; penyusunan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);

e. pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten.

**4.2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa dan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
e. penyusunan, pelaksanaan, pengoordinasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
f. pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten.

**4.3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian dan sumber daya alam dan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian dan sumber daya alam;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian dan sumber daya alam;
c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;

d. penyusunan, pelaksanaan, pengoordinasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
e. pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten.

**5. Asisten Administrasi Umum**

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
b. penyusunan kebijakan daerah dibidang organisasi;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang organisasi;
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang organisasi;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN);
g. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, meliputi Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

**5.1. Kepala Bagian Umum**

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan dan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang tata usaha pimpinan dan staf ahli;
b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan dilingkungan Sekretariat Daerah;
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah;
d. pelaksanaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah;
e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana perlengkapan rumah tangga;
f. penyusunan, pelaksanaan, pengoordinasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten.

**5.2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan dan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
d. penyusunan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
e. pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten.

**5.2.1. Kepala Sub Bagian Protokol**

mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan serta mengoordinasikan kegiatan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati, keprotokolan Pimpinan, tamu dan pengelolaan ketatausahaan untuk Bupati dan Wakil Bupati dan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan keprotokolan penyambutan tamu Pemerintah Daerah;
b. penyusunan, penyiapan dan pelaksanaan keprotokolan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
c. penyusunan tata upacara bendera dan upacara bukan bendera Pemerintah Daerah;
d. pengelolaan informasi acara dan jadwal kegiatan Pemerintah Daerah serta Bupati dan Wakil Bupati;
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
f. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan teknis penyelenggaraan keprotokolan;
g. pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

**5.2.2.** Kelompok Jabatan Fungsional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara Bupati dan Wakil Bupati;
b. pemberian masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati tentang penyampaian informasi tertentu;
c. pemberian informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
d. penghimpunan dan pengelolaan informasi yang yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
e. penyiapan bahan materi rapat;
f. penyusunan naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati;
g. pendokumentasian kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
h. pelaksanaan dan pengaturan media massa dalam rangka peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
i. penghimpunan berita yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang disampaikan oleh media masa;
j. penyusunan notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

**5.3. Kepala Bagian Organisasi**

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis dan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi program kegiatan pembinaan teknis administrasi dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik serta kinerja dan reformasi birokrasi dan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian tugas Perangkat Daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
e. pelaksanaan, penyusunan, pengoordinasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
f. pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten.

**6. Kelompok Jabatan Fungsional**

a. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3, huruf c angka 1 sampai dengan angka dan huruf d angka 1, angka 2 huruf b) dan angka 3 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator;
d. Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Pejabat;
e. Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
f. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah;

g. Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator melalui Surat Tugas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pejabat Tinggi Pratama sesuai dengan keahlian;
i. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
j. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Pejabat Tinggi Pratama;
k. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
l. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Gambar 2.1**

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo

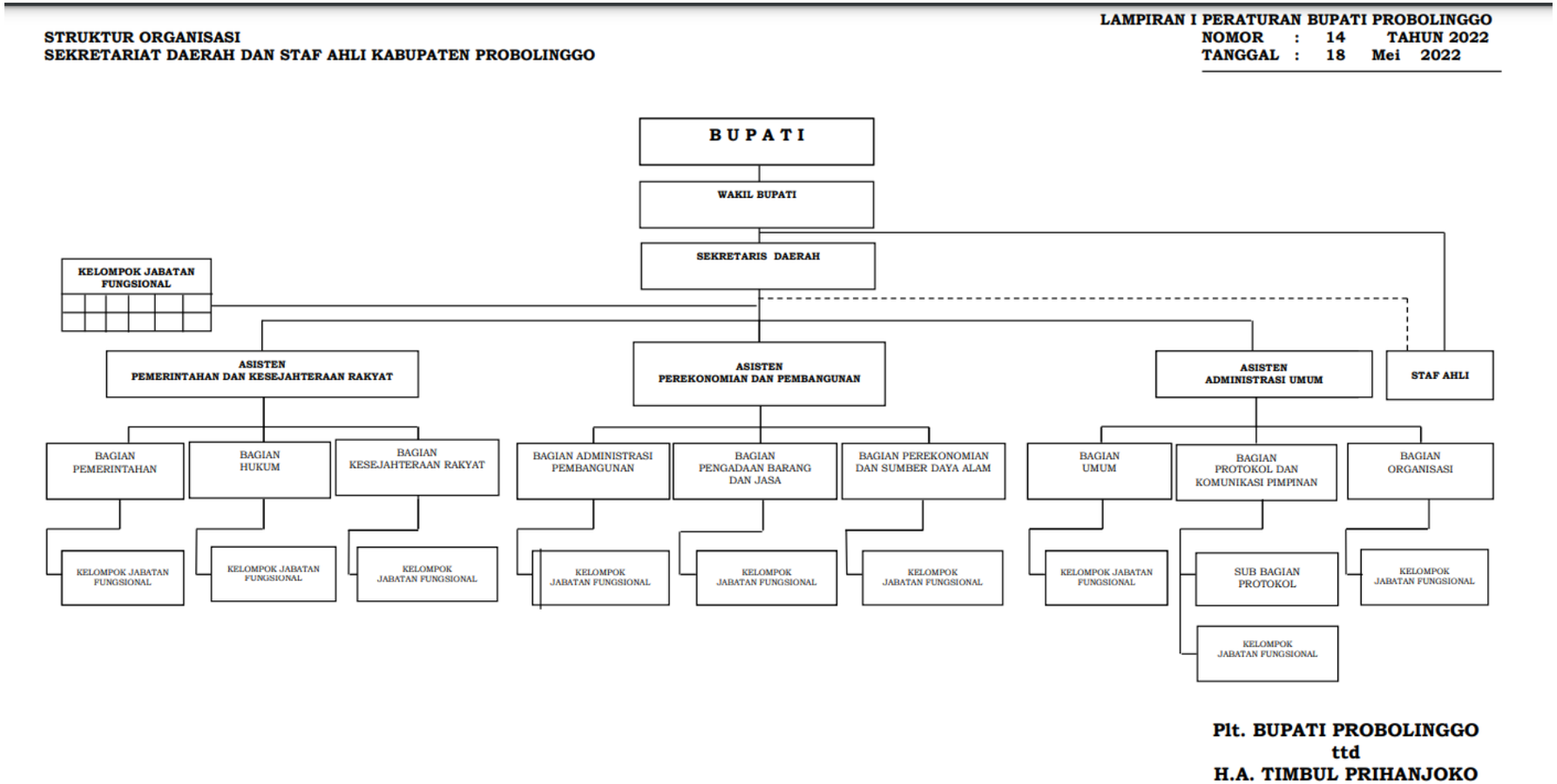

## 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.2.2. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia di Sekretariat Daerah sebagaimana table berikut.

**Tabel 2.1.**

Kondisi Faktual dan Formasi Pegawai Sekretariat Daerah

| BAGIAN | FORMASI | EKSISTING | | | | KEKURANGAN/ KELEBIHAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | P3K | PARUH WAKTU | JUMLAH | | |
| Bagian Umum | 87 | 31 | 3 | 40 | 74 | -13 | |
| Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 47 | 6 | 2 | 10 | 18 | -29 | |
| Bagian Organisasi | 35 | 10 | 3 | 1 | 14 | -21 | |
| Bagian Kesejateraan Rakyat | 25 | 7 | 2 | 6 | 15 | -10 | |
| Bagian Pemerintahan | 31 | 6 | 3 | 4 | 13 | -18 | |
| Bagian Hukum | 31 | 9 | 3 | 5 | 17 | -14 | |
| Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 27 | 5 | 3 | 3 | 11 | -16 | |
| Bagian Administrasi Pembangunan | 27 | 6 | 0 | 2 | 8 | -19 | |
| Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 52 | 29 | 1 | 4 | 34 | -18 | |
| JUMLAH | 362 | 109 | 20 | 75 | 204 | -158 | |

Sumber data : Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP Online) yang di kelola Tahun 2025 https://siap-bkpsdm.probolinggokab.go.id/

Dari tabel diatas, Kondisi Faktual dan Formasi Pegawai di Sekretariat Daerah dari PNS sebesar 109 Pegawai dengan Persentase 30,11%, PPPK sebesar 20 Pegawai dengan Persentase 5,52%, PPPK Paruh Waktu sebesar 75 Pegawai dengan Persentase 20,72%, dari kondisi hari ini masih kurang 158 pegawai dengan Persentase 43,65%, sedangkan kebutuhan formasi 362 Pegawai di lingkungan Sekretriat Daerah

**Tabel 2.2.**

Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

| BAGIAN | S3 | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian Umum | 0 | 8 | 31 | 3 | 1 | 30 | 74 |
| Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| Bagian Organisasi | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Bagian Kesejateraan Rakyat | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Bagian Pemerintahan | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Bagian Hukum | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| JUMLAH | 0 | 27 | 116 | 9 | 1 | 50 | 204 |

Sumber data : Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP Online) yang di kelola Tahun 2025 https://siap-bkpsdm.probolinggokab.go.id/

Dari tabel diatas, SDM di Sekretariat Daerah berpendidikan S2 sebesar 13,24%, berpendidikan S1 sebesar 56,86%, berpendidikan D3 sebesar 4,41%. Sedangkan yang masih perlu ditingkatkan pendidikannya yaitu berpendidikan D1 sebesar 0,49%, berpendidikan SMA sebesar 24,51% dan berpendidikan SMP sebesar 0,49%.

**Tabel 2.3.**

Sebaran ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

| BAGIAN | Gol IV | Gol III | GOL II | GOLONGAN IX | GOLONGAN VII | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian Umum | 7 | 12 | 12 | 2 | 1 | 34 |
| Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Bagian Organisasi | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| Bagian Kesejateraan Rakyat | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Bagian Pemerintahan | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Bagian Hukum | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Bagian Administrasi Pembangunan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| JUMLAH | 12 | 72 | 25 | 18 | 2 | 129 |

Sumber data : Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP Online) yang di kelola Tahun 2025
https://siap-bkpsdm.probolinggokab.go.id/

Dari tabel diatas, PNS golongan IV sebesar 9,30%, PNS dengan Golongan III sebesar 55,81%, PNS Golongan II sebesar 19,38%, PPPK Golongan IX sebesar 13,95%, dan PPPK Golongan VII sebesar 1,55%. ASN dengan jabatan fungsional pasca Penyetaraan Jabatan akan mengalami kenaikan pangkat dan golongan sesuai dengan regulasi yang berlaku

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. Data sarana dan prasarana ini sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**

Sarana dan Prasarana di Lingkup Sekertariat Daerah

| NO. | BAGIAN | TAHUN 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASET TETAP | | | | | ASET LAINNYA | |
| | | TANAH | MESIN | BANGUNAN | IRIGASI | ASET TETAP LAINNYA | ASET TAK BERWUJUD | ASET LAINNYA |
| 1 | Bagian Umum | 281.177.333.333 | 37.389.038.967 | 1.327.831.401.972 | 1.024.643.520 | 434.750.000 | 74.503.000 | 4.481.742.305 |
| 2 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 5.391.118.000 | 10.205.748.433 | 10.231.579.059 | 5.299.000 | 139.402.050 | 0 | 687.501.400 |
| 3 | Bagian Organisasi | 0 | 937.628.267 | 0 | 0 | 0 | 83.811.500 | 229.170.455 |
| 4 | Bagian Kesejateraan Rakyat | 0 | 955.173.205 | 0 | 0 | 469.777.500 | 0 | 75.812.000 |
| 5 | Bagian Pemerintahan | 0 | 800.256.420 | 0 | 157.100.000 | 1.750.000 | 70.000.000 | 135.990.800 |
| 6 | Bagian Hukum | 0 | 873.634.431 | 0 | 0 | 436.455.250 | 100.419.000 | 15.762.715 |
| 7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 895.533.761 | 0 | 0 | 0 | 196.080.000 | 20.600.072 |
| 8 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 1.188.113.534 | 0 | 14.450.000 | 9.250 | 870.040.000 | 170.784.150 |
| 9 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 303.104.525.001 | 0 | 39.333.334 | 653.499.150 | 121.296.050 | 1.846.563.400 |
| **JUMLAH** | | **286.568.451.333** | **356.349.652.019** | **1.338.062.981.031** | **1.240.825.854** | **2.135.643.200** | **1.516.149.550** | **7.663.927.297** |

| NO. | BAGIAN | TAHUN 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASET TETAP | | | | | ASET LAINNYA | |
| | | TANAH | MESIN | BANGUNAN | IRIGASI | ASET TETAP LAINNYA | ASET TAK BERWUJUD | ASET LAINNYA |
| 1 | Bagian Umum | 281.177.333.333 | 37.389.038.967 | 132.783.140.197 | 1.024.643.520 | 434.750.000 | 74.503.000 | 4.481.742.305 |
| 2 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 5.391.118.000 | 9.609.104.683 | 10.231.579.059 | 45.299.000 | 139.402.050 | 47.900.000 | 687.501.400 |
| 3 | Bagian Organisasi | 0 | 1.056.339.167 | 0 | 0 | 0 | 49.561.500 | 229.170.455 |
| 4 | Bagian Kesejateraan Rakyat | 0 | 955.173.205 | 0 | 0 | 469.727.500 | 0 | 75.812.000 |
| 5 | Bagian Pemerintahan | 0 | 812.256.420 | 157.100.000 | 0 | 1.750.000 | 70.000.000 | 135.990.800 |
| 6 | Bagian Hukum | 0 | 89.354.243.104 | 0 | 0 | 436.455.250 | 0 | 0 |
| 7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 895.533.761 | 0 | 0 | 0 | 196.080.000 | 20.600.072 |

| NO. | BAGIAN | TAHUN 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASET TETAP | | | | | ASET LAINNYA | |
| | | TANAH | MESIN | BANGUNAN | IRIGASI | ASET TETAP LAINNYA | ASET TAK BERWUJUD | ASET LAINNYA |
| 8 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 1.225.956.034 | 0 | 14.450.000 | 9.250 | 327.309.000 | 170.784.150 |
| 9 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 3.062.095.250 | 0 | 393.333 | 653.499.150 | 121.296.050 | 1.846.563.400 |
| **JUMLAH** | | **286.568.451.333** | **144.359.740.591** | **143.171.819.256** | **1.084.785.853** | **2.135.593.200** | **886.649.550** | **7.648.164.582** |

| NO. | BAGIAN | TAHUN 2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASET TETAP | | | | | ASET LAINNYA | |
| | | TANAH | MESIN | BANGUNAN | IRIGASI | ASET TETAP LAINNYA | ASET TAK BERWUJUD | ASET LAINNYA |
| 1 | Bagian Umum | 281.177.333.333 | 40.374.132.167 | 134.144.096.641 | 1.024.643.520 | 434.750.000 | 74.503.000 | 4.481.742.305 |
| 2 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 5.391.118.000 | 9.609.104.683 | 10.231.579.059 | 45.299.000 | 139.402.050 | 47.900.000 | 687.501.400 |
| 3 | Bagian Organisasi | 0 | 1.045.064.167 | 0 | 0 | 0 | 49.561.500 | 240.445.455 |
| 4 | Bagian Kesejateraan Rakyat | 0 | 935.773.205 | 0 | 0 | 469.727.500 | 0 | 75.812.000 |
| 5 | Bagian Pemerintahan | 0 | 859.641.020 | 157.100.000 | 0 | 1.750.000 | 70.000.000 | 135.990.800 |
| 6 | Bagian Hukum | 0 | 958.593.881 | 0 | 0 | 436.455.250 | 0 | 0 |
| 7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 895.533.761 | 0 | 0 | 0 | 196.080.000 | 20.600.072 |
| 8 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 1.214.656.034 | 0 | 14.450.000 | 9.250 | 327.309.000 | 170.784.150 |
| 9 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 3.063.770.250,01 | 0 | 393.333,34 | 653.499.150,00 | 121.296.050 | 1.846.563.400 |
| **JUMLAH** | | **286.568.451.333** | **58.956.269.168** | **144.532.775.700** | **1.084.785.853** | **2.135.593.200** | **886.649.550** | **7.659.439.582** |

Sumber data : Sistem Infoemasi Pembangunan Daerah (SIPD BMD)

### 2.2.3. **Sumber Daya Keuangan**

Sumber daya keuangan adalah seluruh bentuk dana atau anggaran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan operasional pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, sumber daya keuangan meliputi pendapatan daerah (seperti dana transfer dari pemerintah pusat, pendapatan asli daerah, dan lain-lain), serta belanja daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber daya keuangan memegang peranan penting dalam menjamin keberlangsungan dan

efektivitas pencapaian sasaran strategis, karena menjadi dasar pembiayaan atas seluruh kegiatan pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan administrasi pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

Adapun sumberdaya keuangan secretariat daerah dapat diliat dari table sebagaimana berikut :

**Tabel 2.5**

Sumberdaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekretariat Daerah

| NO | URAIAN | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | PAGU | REALISASI | PAGU | REALISASI | PAGU | REALISASI | PAGU | REALISASI | PAGU | REALISASI (n) |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | |
| 1. | Retribusi Daerah | 110.000.000 | 110.000.000 | 151.000.000 | 151.050.000 | 90.000.000 | 95.357.000 | 130.000.000 | 135.772.000 | 141.500.000 | 113.200.000 |
| 2. | Lain-lain PAD yang Sah | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000.000 | 62.750.000 | 68.000.000 | 63.000.000 | 89.400.000 | 64.950.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | **110.000.000** | **110.000.000** | **151.000.000** | **151.050.000** | **158.000.000** | **158.125.000** | **198.000.000** | **198.772.000** | **230.900.000** | **178.150.000** |

Sumber Data : Sistem Infoemasi Pembangunan Daerah (SIPD Penatausahaan)

https://sipd.kemendagri.go.id/

**Tabel 2.6.**
Sumberdaya Keuangan Sekretariat Daerah

| NO. | REK | URAIAN | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (N) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | REALISASI | % | PAGU | REALISASI | % | PAGU | REALISASI | % | PAGU | REALISASI | % | PAGU | REALISASI | % |
| 1 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 45.116.613.464 | 42.906.740.798 | 95,10 | 17.074.740.000 | 16.186.046.820 | 94,80 | 17.796.277.605 | 16.184.115.034 | 90,94 | 18.188.400.000 | 16.890.413.477 | 92,86 | 18.562.059.053 | 12.138.657.318 | 65,39 |
| 2 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.076.918.601 | 16.876.164.109 | 88,46 | 25.918.083.744 | 24.894.475.529 | 96,05 | 27.915.042.077 | 27.291.717.633 | 97,77 | 29.078.697.967 | 28.040.134.619 | 96,43 | 36.010.993.285 | 21.131.004.741 | 58,68 |
| 3 | 5.2 | Belanja Modal | 1.609.378.000 | 1.484.827.600 | 92,26 | 573.916.000 | 525.573.612 | 91,58 | 1.690.131.720 | 1.543.013.600 | 91,30 | 1.144.087.284 | 1.056.656.050 | 92,36 | 5.457.992.900 | 4.244.351.800 | 77,76 |
| JUMLAH | | | 65.802.910.065 | 61.267.732.507 | 93,11 | 43.566.739.744 | 41.606.095.961 | 95,50 | 47.401.451.402 | 45.018.846.267 | 94,97 | 48.411.185.251 | 45.987.204.146 | 94,99 | 60.031.045.238 | 37.514.013.859 | 62,49 |

Sumber data : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD Penatausahaan) https://sipd.kemendagri.go.id/

## 2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo adalah tingkat keberhasilan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan kepada kepala daerah dan seluruh perangkat daerah, yang diukur berdasarkan efektivitas, efisiensi, ketepatan, kualitas, dan kepuasan pengguna layanan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2023–2024), Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren kinerja yang cukup baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang sebagian besar mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Secara umum pada Anggaran 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana perjanjian kerja yang teah ditetapkan, Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari prosentase pencapaian kinerja pada setiap sasaran lebih besar 95%, bahkan 2 indikator lebih dari 100%, sedangkan dari segi anggaran telah terealisasi sebesar 94,97%. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 indikator dapat dilihat dari prosentase pencapaian kinerja dan anggaran pada setiap sasaran, yaitu:

1. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi PD dengan indikator :
   a. Prensentae Perangkat Daerah dengan nilai pelaporan kinerja minimal 10 tercapai kinerjanya sebesar 100% dan capaian keuangan 97,12% dengan tigkat efisiensi 1,03;
   b. Nilai KHE AKIP Pemda tercapai kinerjanya sebesar 67,11 dan Nilai AKIP Pemda pada komponen Pelaporan Kinerja tercapai kinerja sebesar 10,59 dengan capaian keuangan 93,92% serta tingkat efisiensi sebesar 0,71.
2. Sasaran Optimalisai Pengkoordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra dengan indicator :
   a. Nilai e LPPD capaian kinerjanya belum diketahui menunggu hasil penilaian Kemendagri, dan capaian keuangannya sebesar 86,79%;
   b. Presentase Fasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kebijakan Bid Pemerintahan dan Kesra capaian kinerjanya 98,06% capaian keuangan sebesar 99,63 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98;
   c. Indeks Kualitas Kebijakan tercapai kinerjanya sebesar 44,95 dan Indeks Reformasi Hukum capaian kinerjanya sebesar 87,32, sedangkan capaian keuangan sebesar 98,30%.
3. Optimalisasi Pengkoordinasian Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan serta evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator :
   a. Presentase Fasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kebijakan Bid Perekonomian tercapai kinerjanya sebesar 90%, capaian keuangan sebesar 69,57% dan tingkat efisiensi sebesar 1,29;
   b. Presentase Fasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kebijakan Bid Peembangunan dengan capaian kinerja sebesar 90%, capaian keuangan sebesar 83,08% dan tingkat efisiensi sebesar 1,08;
   c. Indeks Tata Kelola Pengadaan dengan capaian kinerja sebesar 76,45%, capaian keuangan sebesar 96,56% dan tingkat efisiensi sebesar 0,79.

4. Optimalisasi Pengkoordinasian Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan serta evaluasi dan pelaporan Bidang Administrasi Umum dengan indikator :
   a. Presentase Fasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kebijakan Bidang Administrasi Umum dengan capaian kinerja sebesar 90%, capaian keuangan sebesar 93,17% dan tingkat efisiensi sebesar 0,97;
   b. Presentase Fasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kebijakan Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan capaian kinerja sebesar 90%, capaian keuangan sebesar 94,35% dan tingkat efisiensi sebesar 0,95;
   c. Indeks Kematangan Kelembagaan dengan capaian kinerja sebesar 30,27%, capaian keuangan sebesar 97,20% dan tingkat efisiensi sebesar 0,31.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan PD dengan indicator % PD dengan nilai IKM minimal diatas 85 tercapai kinerjanya 61% dan capaian keuangan 0, karena kegiatan dilakukan melekat di setiap aktifitas di masing-masing bagian. Hal ini dapat diartikan sangat efektif.

Berikut ini adalah table capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 sampai 2024 :

**Tabel 2.7.**

Capaian Kinerja Setda Tahun 2019-2023

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Meningkatkan kualitas tata kelola PD | Nilai SAKIP Pemda | Nilai | B | BB | A | A | A | 71,5 | 72,41 | 68,01 | 68,68 | 67,43 |
| | | Nilai SAKIP PD Komponen Pelaporan | Nilai | 9,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | | | 10,2 | 11,25 | NA |
| | | Realisasi Kebijakan bidang Pemerintahan Umum terlaksana | % | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 95,41 | 104,44 |
| | | Nilai SAKIP Setda | Nilai | B | BB | BB | BB | BB | B | B | BB | BB | NA |
| | | | | | | 71 | 72 | 74 | - | - | 71,95 | 72,41 | NA |
| | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah | Realisasi Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan terlaksana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82,4 | 86,67 |
| | | Realisasi Kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terlaksana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,58 |
| | | IKM Setda | Nilai | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,23 |

Sumberdata : RENSTRA SETDA 2018-2023

TABEL 2.8
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

| TUJUAN RENSTRA SETDA | INDIKATOR | TARGET TH 2024 | REALISASI TH 2024 | CAPAIAN % | PREDIKAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemda dan PD | 1. Nilai LHE AKIP PEMDA Komponen Pelaporan Kinerja | 10,91 | 10,59 | 97,07 | Baik |
| | 2. Indeks Reformasi Hukum | 40,00 | 87,32 | 218,30 | SANGAT BAIK |
| | 3. Indeks Kualitas Kebijakan | 45,00 | 44,95 | 99,89 | Baik |
| | 4. Nilai e LPPD | 3,35 | NA | | |
| | 5. Indeks Tata Kelola Pengadaan | 74,96 | 76,45 | 101,99 | SANGAT BAIK |
| | 6. Indeks Kematangan Kelembagaan | 30,50 | 30,27 | 99,25 | Baik |
| | 7. % Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra terlaksana | 90,00 | 98,06 | 108,96 | SANGAT BAIK |
| | 8. % Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan terlaksana | 90,00 | 90,00 | 100,00 | Baik |
| | 9. % Realisasi Kebijakan Bidang Adminsitrasi Umum terlaksana | 90,00 | 90,00 | 100,00 | Baik |
| 2. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemda | IKM Pemda | 85,00 | 86,75 | 102,06 | SANGAT BAIK |

| SASARAN RENSTRA SETDA | INDIKATOR | TARGET TH 2024 | REALISASI TH 2024 | CAPAIAN % | PREDIKAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Perangkat Daerah | % PD dengan nilai pelaporan kinerja minimal 10 pada LHE AKIP PD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Baik |
| | Nilai LHE AKIP Pemda | 70,00 | 67,11 | 95,87 | Baik |
| | Nilai AKIP Pemda Pelaporan Kinerja | 10,91 | 10,59 | 97,07 | Baik |
| 1.2. Optimalisasi Pengkoordinasian Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan serta evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Nilai e LPPD | 3,35 | NA | | |
| | % Fasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kebijakan Bid Pemerintahan dan Kesra | 90,00 | 98,06 | 108,96 | SANGAT BAIK |
| | Indeks Reformasi Hukum | 40,00 | 87,32 | 218,30 | SANGAT BAIK |
| | Indeks Kualitas Kebijakan | 45,00 | 44,95 | 99,89 | Baik |
| 1.3. Optimalisasi Pengkoordinasian Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan serta evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Pembangunan | % Fasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kebijakan Bid Perekonomian | 90,00 | 90,00 | 100,00 | Baik |
| | % Fasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kebijakan Bid Pembangunan | 90,00 | 90,00 | 100,00 | Baik |
| | Indeks Tata Kelola Pengadaan | 74,96 | 76,45 | 101,99 | SANGAT BAIK |
| 1.4. Optimalisasi Pengkoordinasian Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan serta | % Fasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kebijakan Bid Administrasi Umum | 90,00 | 90,00 | 100,00 | Baik |

| SASARAN RENSTRA SETDA | INDIKATOR | TARGET TH 2024 | REALISASI TH 2024 | CAPAIAN % | PREDIKAT |
|---|---|---|---|---|---|
| evaluasi dan pelaporan Bidang Administrasi Umum | % Fasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan | 90,00 | 90,00 | 100,00 | Baik |

Catatan :

NA = data belum didapat

Dari tabel di atas, capaian indicator tujuan Setda pada Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemda serta Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemda, beberapa indicator terealisasi berpredikat baik dan 1 indikator masih belum didapat datanya. Demikian juga pada capaian indicator Sasaran Setda

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat sejumlah tantangan sekaligus peluang yang perlu dikelola dengan baik agar pelayanan dapat berkembang secara optimal.

Dari sisi **tantangan**, Setda menghadapi kompleksitas koordinasi lintas bagian yang sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi persoalan karena tidak semua aparatur memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan era digital dan kebutuhan pelayanan publik modern. Selain itu, keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana turut memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Perubahan regulasi yang cepat menuntut adaptasi yang tinggi, sementara budaya birokrasi yang masih konvensional sering kali menghambat terciptanya pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif. Di sisi lain, meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik juga menjadi tantangan tersendiri, di mana masyarakat semakin kritis terhadap tata kelola pemerintahan.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat berbagai **peluang pengembangan**. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi peluang besar untuk mempercepat digitalisasi administrasi, mulai dari e-office, e-planning, hingga sistem informasi kepegawaian. Sekretariat Daerah juga memiliki peluang untuk memperkuat perannya sebagai supporting system Kepala Daerah dalam mengoordinasikan perangkat daerah serta memastikan program prioritas terlaksana dengan baik. Peningkatan kompetensi ASN melalui berbagai pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas dapat menjadi modal penting dalam menjawab tantangan birokrasi modern. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dengan OPD, pemerintah pusat, maupun swasta dapat membuka ruang inovasi pelayanan publik yang lebih efektif.

Lebih jauh, reformasi birokrasi dan internalisasi nilai-nilai dasar ASN (BERAKHLAK) memberi peluang bagi Sekretariat Daerah untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan budaya pelayanan prima. Inovasi pelayanan publik, baik melalui sistem digital maupun pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif.

Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Sekretariat Daerah berpotensi menjadi motor penggerak pelayanan pemerintahan yang modern, adaptif, serta

berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

- **Tantangan pengembangan pelayanan sekretariat daerah :**
  a. Koordinasi Lintas Bagian yang Kompleks, Sekretariat Daerah membawahi banyak bagian (pemerintahan, kesra, hukum, perekonomian, umum, organisasi, dll.), sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan, komunikasi yang lambat, atau koordinasi yang kurang efektif;
  b. Keterbatasan SDM dan Kompetensi, Tidak semua aparatur memiliki keahlian sesuai tuntutan digitalisasi, manajemen modern, atau pelayanan publik prima dan Tugas administratif sering menyita waktu sehingga inovasi pelayanan kurang berkembang;
  c. Keterbatasan Anggaran dan Sarana, Kebutuhan pelayanan yang meningkat tidak selalu diimbangi dengan anggaran, fasilitas kerja, serta infrastruktur teknologi yang memadai;
  d. Adaptasi terhadap Regulasi dan Kebijakan yang Dinamis, Setda harus selalu menyesuaikan dengan kebijakan pusat maupun daerah, sehingga rawan terjadi keterlambatan implementasi jika regulasi berubah cepat;
  e. Budaya Birokrasi yang Masih Konvensional, Masih ada budaya kerja yang birokratis, lambat, kurang responsif, dan kurang berorientasi pada kepuasan stakeholder;
  f. Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi Publik, Masyarakat semakin kritis terhadap tata kelola pemerintahan, sehingga pelayanan Setda harus terbuka, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi.
- **Peluang pengembangan pelayanan sekretariat daerah :**
  a. Pemanfaatan Teknologi Informasi, diproses administrasi (e-office, e-budgeting, e-planning, SIK, aplikasi pengaduan, dan manajemen arsip elektronik) akan meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan;
  b. Penguatan Peran Sebagai Supporting System Kepala Daerah, SETDA berpeluang memperkuat fungsi strategis dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan perangkat daerah, serta memastikan program prioritas daerah berjalan tepat sasaran;
  c. Peningkatan Kompetensi ASN, Dengan program pelatihan, bimtek, diklat, dan sertifikasi, ASN di Setda dapat lebih profesional, adaptif, dan inovatif dalam memberikan pelayanan;
  d. Kolaborasi dan Sinergi, Setda dapat menjalin kerja sama lintas OPD, dengan pemerintah pusat, swasta, maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
  e. Inovasi Pelayanan Publik, Munculnya tuntutan pelayanan cepat dan mudah dapat dijawab dengan inovasi, misalnya aplikasi pelayanan terpadu, sistem informasi berbasis data, hingga pelayanan publik berbasis AI dan big data;
  f. Reformasi Birokrasi dan Penerapan Nilai ASN (BERAKHLAK), Peluang untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan budaya kerja pelayanan prima, sehingga Setda dapat menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan.

### 2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan PD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan

secara komprehensif untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, dan profesional. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan identifikasi terhadap berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Permasalahan utama terletak pada lemahnya kapasitas koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi kebijakan antar perangkat daerah, yang menghambat optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Kualitas pelayanan aparatur, baik dari segi kompetensi, kedisiplinan, maupun pengelolaan administrasi dan kepegawaian, masih belum memadai. Di sisi lain, sistem pelaporan, evaluasi, dan pengukuran kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil dan belum didukung dengan data yang akurat serta teknologi informasi yang terintegrasi.

Persoalan lain yang turut mempengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan adalah belum tertatanya data wilayah dan batas administrasi, terbatasnya kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga, serta belum optimalnya mitigasi risiko sosial dan fasilitasi keagamaan. Di bidang pelayanan hukum, masih terdapat kekurangan tenaga profesional serta lemahnya monitoring terhadap produk hukum daerah.

Selain itu, penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan serta pengadaan barang dan jasa masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman regulasi, keterbatasan anggaran, dan minimnya tenaga teknis profesional, khususnya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta jabatan fungsional pengadaan. Aspek kelembagaan, reformasi birokrasi, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan juga menunjukkan kelemahan yang memerlukan perhatian khusus.

Kelemahan dalam pengelolaan administrasi keuangan, inventarisasi aset, serta tindak lanjut temuan pemeriksaan menunjukkan masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan rendahnya kapasitas SDM di berbagai bidang strategis pemerintahan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kompetensi SDM, mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan, serta memperbaiki tata kelola manajerial dan koordinatif, guna mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

**Tabel 2.9**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah

| BAGIAN | PERMASALAHAN | AKAR MASALAH | FAKTOR PENDUKUNG | FAKTOR PENGHAMBAT | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAG. UMUM | Belum optimalnya layanan kesekretariatan | Terbatasnya layanan pemeliharaan barang dan jasa serta layanan kerumahtanggaan | Perbup tusi | Belum dilakukan evaluasi pemeliharaan barang dan jasa serta layanan kerumahtanggaan | Peningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Sekretariat Daerah dengan pihak-pihak terkait | Mengadakan rapat koordinasi berkala dengan pihak-pihak terkait untuk membahas kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan |
| | | Layanan administrasi keuangan belum optimal | Layanan administrasi keuangan menggunakan sistem informasi | Kurangnya SDM pengelola keuangan yang terampil dan berpengalaman sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya layanan keuangan dan penurunan produktivitas | Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM | Melakukan rekrutmen staf |
| | | | | | | Melakukan pelatihan dan bimtek bagi pejabat/staf pengelola administrasi keuangan |
| | | Layanan surat menyurat | Layanan surat-menyurat menggunakan aplikasi Srikandi | Aplikasi Srikandi sering mengalami gangguan | Penyusunan SOP pengelolaan surat-menyurat dan kepegawaian | Menyusun, melakukan evaluasi dan pemutakhiran SOP pengelolaan surat-menyurat |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kualitas SDM beragam | Regulasi peningkatan komptensi SDM | Terbatasnya diklat dan jumlah peserta yang dapat megikuti diklat | Penyusunan rencana kebutuhan peningkatan komptensi SDM | Mengimplementasikan peningkatan kompetensi SDM |
| BAG. ORGANISASI | Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berdampak | Kurangnya pemahaman pentingnya pelaksanaan RB Berdampak | Terbentuknya Tim RB Tematik berdasarkan penetapan SK Sekretaris Daerah | Kurangnya komitmen Kepala PD dalam implementasi RB Berdampak | Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berdampak (Tematik) | Menguatkan tim RB Tematik |
| | | | | | | Mengoptimalkan penyusunan rencana aksi dan pelaksanaan RB Tematik |
| | Masih lemahnya budaya kerja ASN sesuai Core Values BerAKHLAK khususnya nilai Adaptif | Masih banyaknya pegawai yang enggan untuk mempelajari IT dan optimalisasi pemanfaatan IT dalam menunjang kinerja sehari-hari | Surat Edaran Bupati No: 800/222/426.53/2021 tentang implementasi Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Bupati No: 63 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 | Kurangnya kesadaran SDM dalam pelaksanaan core Values BerAKHLAK khususnya nilai dasar Adaptif | Kolaborasi dengan BKPSDM dalam implementasi core values berAKHLAK | Menguatkan nilai dasar core values berAKHLAK serta melakukan monitoring dan evaluasi |
| | | | | | Penguatan budaya adatif dengan berinovasi pelayanan publik pada PD/UPP | Melakukan pendampingan dan penguatan keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan public |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik | Belum lengkapnya dokumen kebijakan pelayanan publik (SP, MP, FKP, dan SOP) di sebagian PD | Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati No: 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik | PD / Unit Pelayanan Publik tidak memiliki dokumen kebijakan pelayanan publik (SP, MP, FKP, dan SOP) | Pendampingan penyusunan dokumen kebijakan pelayanan publik (SP, MP, FKP, dan SOP) | Melakukan bimtek penyusunan dokumen kebijakan pelayanan publik (SP, MP, FKP, dan SOP) |
| | | | | | | Monitoring dan evaluasi pelayanan publik |
| | | Survei Kepuasan Masyarakat belum terlaksana secara optimal | Replikasi Sukma-e sebagai tool pelaksanaan SKM | Tidak semua PD/Unit kerja melakukan SKM setelah memberikan pelayanan kepada masyarakat | Penilaian dan evaluasi hasil SKM pada PD | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM pada PD |
| | | | | | | Mewajibkan pelaporan SKM dari PD |
| | Belum optimalnya pelaksanaan analisa kebutuhan Jabatan (ABK) | Perubahan regulasi secara terus menerus | Adanya regulasi dari pusat sebagai acuan dalam pelaksanaan identifikasi jabatan | kesulitan dalam penyusunan identifikasi jabatan terhadap kebutuhan PD | Pelaksanaan Job mapping berupa konversi jabatan | Menyusun peraturan bupati tentang peta jabatan |
| Bag. PROTOKOL DAN KP | Kurang maksimalnya pelayanan terhadap | Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam | Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan dan PP | Terbatasmya sumber daya untuk pelayanan pimpinan | Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber | Mengoptimalkan pendampingan kepada pimpinan dan Monev |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pimpinan Kepala Daerah | pendampingan pimpinan serangkaian keprotokolan | Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU no. 9 Tahun 2010 | | daya dalam pendampingan kepada pimpinan | |
| | | | Adanya aplikasi e Agenda | Tingginya intensitas kegiatan pimpinan | Pengoptimalisasi pemanfaatan e Agenda | Meningkatkan pemanfaatan e Agenda |
| | | | | Belum ada SOP keprotokolan pimpinan | Penyusunan standar pelayanan keprotokolan pimpinan | Menyusun SOP dan MP pelayanan keprotokolan |
| | Kurang optimal penyebarluasan informasi terkait kegiatan pimpinan di luar wilayah Kabupaten Probolinggo | Kerjasama yang belum maksimal dengan pihak eksternal (media) | Undang-undang No 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Kurangnya tenaga SDM | Penguatan branding Kabupaten Probolinggo dengan pemberitaan positif terhadap pimpinan baik melalui media konvensional maupun sosial media | Meningkatkan Informasi yang lebih luas terkait publikasi pimpinan |
| | Kurang maksimalnya pengolahan sambutan terkait kegiatan pimpinan | Kurangnya koordinasi dengan PD terkait dan waktu yang cenderung mendesak | Perbup tusi Bagian PKP | Kurangnya tenaga SDM penyusun naskah sambutan pimpinan | Pengkoordinasian dengan OPD terkait | Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait pemangku kepentingan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kurang maksimalnya pendokumentasian kegiatan pimpinan | Kurangnya koordinasi dengan PD terkait | Perbup tusi Bagian PKP | Kurangnya tenaga SDM | Pelatihan pendokumentasian kegiatan pimpinan | Mengadakan bimtek |
| | | | | Keterbatasan sarana prasarana | Peningkatan sarpras | Menambah dan mengoptimalisasi sarpras |
| | | | | Belum ada SOP pendokumentasian kegiatan pimpinan | Penyusunan standar pelayanan pendokumentasian kegiatan pimpinan | Menyusun SOP dan MP pelayanan pendokumentasian kegiatan pimpinan |
| BAG. PEMERINTAHAN | Kebijakan yang mengatur tentang nama wilayah adminstrasi pemerintahan (Kecamatan, Kelurahan, Desa) belum ada | Beberapa data wilayah administrasi pemerintahan tidak sesuai | Perbub tusi tata pemerintahan | Perbedaan nama wilayah administrasi dari pusat dengan pemerintah daerah | Penetapan nama wilayah administrasi pemerintahan bertahap dan tuntas | Mengadakan rapat secara berkala dengan pihak Kecamatan, Kelurahan dan Desa |
| | | | | | | Mengusulkan nama wilayah administrasi pemerintahan yang benar dan tepat pada pemerintah |
| | Kerjasama antar daerah dan pihak ketiga belum optimal dilaksanakan | Kurangnya SDM untuk menindaklanjuti kerjasama dengan pihak ketiga | Perbub tusi tata pemerintahan | SOP kerjasama antar daerah belum ada | Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan kerjasama daerah dan pihak ketiga yang telah dan belum dilaksanakan | Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah dan pihak ketiga |
| | | | | | | Mengoptimalkan kerjasama daerah yang telah disepakati dengan OPD |
| | | | | | | Meningkatkan kompetensi SDM |
| | | | | | | Membuat SOP kerjasama antar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | daerah |
| | | Laporan kerjasama dari PD kurang tertib | Perbub tusi tata pemerintahan | Tidak adanya regulasi pelaporan kerjasama | Peningkatan tertib pelaporan kerjasama daerah | Menyusun regulasi pengiriman laporan progres kerjasama daerah |
| | Pengiriman data terkait LPPD, LKPJ, dan SPM tidak tepat waktu serta kurang valid | Komitmen PD untuk mengirim data masih kurang | PP No 13 Tahun 2019 | Kesulitan pengumpulan data yang tersebar dan kurangnya waktu verifikasi data | PenIngkatan tertib penyusunan laporan | Menyusun regulasi pengiriman laporan tepat waktu |
| | | | | | | Melakukan desk validasi data |
| BAG. KESRA | Belum optimalnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan | Kurangnya monitoring, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan | Adanya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan dan PD terkait | Terkendala waktu dan mitra tidak konsisten antara perencanaan sasaran dan pelaksanaan sasaran | Penggalakkan kegiatan monitoring, evaluasi serta pelaksanaan survey esukma di setiap kegiatan | Mengadakan rapat koordinasi dan kerjasama evaluasi secara berkala dengan pihak pihak terkait |
| | | Kebijakan terkait kesra dan kesmas terbatas | Perbup tusi | Sinksronisasi dan koordinasi dg PD terkait belum optimal | Penyusunan kebijakan kessos dan kesmas bersama PD terkait | Menyusun dan menetapkan kebijakan kessos dan kesmas |
| | | Tindaklanjut hasil SKM belum dilakukan | Adanya aplikasi Sukma e | Tidak semua mitra melaksanakan SKM karena Hp nya tidak mendukung | Pelaksanaan SKM dengan Sukma e | Mengoptimalkan penggunaan Sukma e |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kurangnya penyediaan fasilitas yang menunjang pelayanan | kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan dan PD terkait | Kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas layanan | Penambahan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas layanan | Menambah sarana dan prasarana penunjang peningkatan layanan |
| | | Kualitas SDM kurang optimal | kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan dan PD terkait | Kurangnya jumlah SDM yang kompeten baik di internal maupun mitra | Peningkatan SDM yang ada melalui sosialisasi, workshop dan diklat | Mengadakan peningkatan kualitas SDM |
| BAG. HUKUM | Harmonisasi produk hukum belum optimal | Evaluasi Produk Hukum kurang optimal | Perbup tusi | Jumlah JF perangcang peraturan perundangan terbatas | Penambahan JF Perancang peraturan perundang-undnagan | Mengusulkan penambahan JF Perangcang Peraturan perundang-undangan |
| | | | | Evaluasi produk hukum tidak dilakukan secara periodik | Pelaksanaan evaluasi Produk Hukum bersama PD terkait | Membuat instruksi Kepala Daerah untuk Evaluasi Produk Hukum |
| | | Sistim dan prosedur harmonisasi memerlukan waktu yang lama | Regulasi Harmonisasi Produk Hukum | Komitmen penyelesaian kurang | Penyusunan SOP harmonisasi produk Hukum | Menyusun dan mempulikasikan SOP hormonisasi produk Hukum |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kurang optimalnya penyebarluasan informasi produk hukum | Kurang lengkap produk hukum yang di upload di JDIH | Aplikasi JDIH sudah tersedia | Operator JDIH tidak mengupload Produk Hukum secara periodik | Pengoptimalan JDIH | Melakukan optimalisasi JDIH dengan mengupload semua Produk Hukum secara periodik |
| | Tingginya potensi kasus hukum perdata dan PTUN Pemerintah Daerah | Kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundang2an | Adanya tim penyelesaian permasalahan hukum | Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan | Penyelesaian permasalahan hukum | Memfasilitasi bantuan hukum<br>Mensosialisasikan produk hukum |
| Bag. PEREKONOMIAN DAN SDA | Belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antar PD dalam pengendalian inflasi | Kurangnya pemahaman dan komitmen PD terkait dalam pengendalian inflasi | Adanya Keputusan Bupati tentang Road Map Pengendalian Inflasi Kab. Probolinggo Th 2022-2024 | Belum tersusun Rencana Aksi tahuann sebagai turunan Road Map, yang memuat program kerja 4K (Keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) dan tugas masing-masing PD terkait | Penyusunan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Th 2024 | Menyusun Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Th 2024 |
| | Belum optimalnya pemantauan SDA | Terbatasnya regulasi | Adanya SE larangan penggunaan LPG 3 Kg bagi PNS, TNI, BUMD, BUMD dan keluarganya serta | Regulasi terkait kebijakan SDA, terkait non LPG dan BBM, kurang tersusun | Penyusunan kebijakan SDA non LPG dan BBM | Menyusun kebijakan SDA non LPG dan BBM |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Resto besar<br>Adanya SE Pengaturan BBM Bersubsidi | | | |
| BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Pengendalian dan Monitoring secara realtime dilakukan manual | Belum adanya Sistem TI terpadu untuk pengendalian dan monev | Perbup tentang TUSI | SDM kompeten menggunakan TI tidak ada | Peningkatan Pemanfaatan TI Kerja Sama dengan Kab/kota lain | Meningkatkan pemanfaatan TI untuk pengendalian dan Monev<br>Mengusulkan penambahan SSDM terkait operator TI |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda belum tepat waktu | Sulitnya koordinasi internal di lingkup Setda dengan BPKAD dan Bapelitbangda | Regulasi penyusunan dokumen perencanaan | Adanya perbedaan sumber data | Peningkatan koodinasi, sinkronisasi antar bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan | Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan Dokumen Perencanaan Setda dengan Bapelitbangda dan BPPKAD |
| | | Beragamnya kemampuan pejabat/staf dalam menyusun dokumen perencanaan | Perbup tentang TUSI | Terbatasnya pejabat/staf berkompetensi perencana | Pelaksanaan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan | Melaksanakan pelatihan, bimtek dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan |
| | Perhitungan realisasi fisik masih disamakan dengan realisasi keuangan | Belum adanya sistem perhitungan yang tepat dan mudah | Perbup tentang TUSI | Regulasi penghitungan belum ada | Penyusunan regulaso perhitungan realisasi fisik yang mudah | Menyusun regulasi perhitungan realisasi keuangan dan fisik |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Belum adanya Manajemen Resiko | Belum adanya Sistem TI untuk Manajemen Resiko | Perbup tentang Manajemen Resiko | Belum memahami pentingnya Manajemen Resiko | Sosialisasi pManajemen Resiko | Meningkatkan pemanfaatan penilaian Manajemen Resiko |
| | Data progres keuangan sebagai bahan laporan sangat dinamis | Aplikasi SIPD sering mengalami gangguan | Perbup tentang TUSI | Keterlambatan pelaporan dari PD dan BPKAD | Peningkatan data valid | Meningkatkan konsolidasi data dengan BPKAD |
| | | | | | | Melakukan validasi data berdasarkan pelaporan berbasis TI |
| BAG. PBJ | Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik | Jumlah SDM terbatas | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Minat menjadi JF PBJ, PPKom, Pokja dan Pejabat pengadaan di OPD serta di Bag PBJ kurang, karena resiko pekerjaan yang tinggi | Penyusunan Renaksi Pemenuhan JF PBJ | Mengusulkan pemenuhan SDM JF PBJ |
| | | | Rekomendasi dari LKPP tentang Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Lingkungan | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemerintah Kabupaten Probolinggo | | | |
| | | Kompetensi pelaku PBJ di OPD beragam | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang SDM Pengadaan Barang/Jasa | Kemauan pelaku PBJ kurang | Penyusunan Renaksi pengembangan SDM, baik di Bag PBJ dan OPD | Melaksanakan Renaksi Pengembangan SDM PBJ |
| | | | | Pola Karir JF PBJ belum ada | Penyusunan Regulasi Pola karir JF PBJ | Menyusun dan mengimplementasikan Pola Karir JF PBJ |
| | Kurang optimalnya pelaksanaan proses pemilihan pengadaan barang/jasa | Pemahaman tentang proses PBJ masih terbatas | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Perubahan regulasi terkait PBJ | Peningkatan koordinasi dan pendampingan dengan OPD pengampu | Melaksanakan rakor intens dg OPD pemangku |
| | | | | | | Melakukan pendampingan pada OPD |
| | | | | | | Memberikan jasa konsultasi |

## 2.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah permasalahan atau tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menuntut perhatian, kebijakan, dan tindakan strategis dalam jangka menengah hingga panjang. Isu strategis muncul sebagai hasil dari identifikasi faktor internal dan eksternal, termasuk dinamika lingkungan, kebijakan nasional, aspirasi masyarakat, serta kemampuan dan sumber daya organisasi.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks dan tuntutan perubahan yang cepat, Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo harus menyikapi berbagai isu strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

1. Isu Strategis Internal Perangkat Daerah

   Perangkat Daerah menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tantangan tersebut antara lain:

   a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, taat asas, kolaboratif, dan berintegritas, serta masih terbatasnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance;
   b. Kualitas pelayanan publik yang belum merata dan belum sepenuhnya mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga perlu peningkatan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan;
   c. Masih rendahnya efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang berdampak pada optimalisasi anggaran dan akuntabilitas keuangan daerah;
   d. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kapasitas ASN, khususnya dalam penerapan teknologi informasi dan sistem administrasi digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi modern;
   e. Rendahnya kinerja kelembagaan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, aset daerah (BMD), dan perencanaan program yang berbasis elektronik, yang harus diperkuat untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
   f. Pengelolaan bantuan hibah di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang masih memerlukan optimalisasi agar tepat sasaran dan akuntabel;
   g. Keterbatasan dalam menghasilkan produk hukum daerah yang adaptif dan harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi, serta penyelesaian permasalahan hukum daerah yang belum maksimal;
   h. Belum optimalnya peran keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang strategis.

2. Isu Strategis Global

   Perkembangan global memberikan peluang sekaligus tantangan yang harus direspon dengan kebijakan dan inovasi lokal. Beberapa isu strategis global yang memengaruhi Sekretariat Daerah antara lain:

   a. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan inklusif agar dapat bersaing dalam konteks global dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi;

b. Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainability) dalam seluruh kebijakan dan program daerah sebagai respons terhadap isu lingkungan global dan komitmen nasional;
c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik dan tata kelola ASN secara global, menuntut percepatan adaptasi daerah;
d. Tantangan dalam pengadaan berkelanjutan, termasuk keterbatasan transparansi rantai pasok, akses teknologi hijau yang belum merata, dan perbedaan standar lingkungan internasional yang harus diselaraskan dengan praktik daerah;
e. Peningkatan tuntutan terhadap pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan responsif, khususnya terkait isu HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi, yang menjadi agenda penting dalam tata kelola pemerintahan modern.

3. Isu Strategis Nasional

Secara nasional, terdapat berbagai isu struktural yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi pembangunan daerah agar selaras dan mendukung pencapaian tujuan nasional, di antaranya:

a. Belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi tantangan dalam reformasi birokrasi;
b. Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan pelayanan public;
c. Rendahnya efektivitas pembinaan, inventarisasi, verifikasi, dan pemberian bantuan di bidang keagamaan yang menjadi bagian penting dalam harmonisasi sosial dan keberagaman masyarakat;
d. Investasi yang belum dikelola secara terpadu serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah (BMD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional;
e. Kebutuhan digitalisasi dan penyusunan program kerja yang berbasis kewenangan dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan;
f. Kapasitas SDM yang masih terbatas dalam pengadaan berkelanjutan dan kurangnya integrasi regulasi lingkungan dalam proses pengadaan daerah;
g. Peningkatan tuntutan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang harus mengikuti dinamika nasional agar mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang kuat;
h. Belum optimalnya pemanfaatan produk lokal dalam sistem pengadaan daerah sebagai upaya mendorong ekonomi lokal dan kemandirian.

4. Isu Strategis Regional

Lingkungan regional menghadirkan tantangan tersendiri yang memerlukan kolaborasi antar daerah dan penyesuaian kebijakan yang sinergis, yaitu:

a. Rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur di tingkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pelayanan publik yang responsive;
b. Belum efektifnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan daerah, termasuk rendahnya capaian penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kualitas pelayanan publik di tingkat regional;

c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah serta lemahnya penyelesaian perkara hukum non-litigasi yang berdampak pada kepastian hukum dan iklim investasi daerah;
d. Terbatasnya basis ekonomi daerah yang dapat berperan sebagai penggerak utama dinamika perekonomian regional;
e. Minimnya infrastruktur pendukung pengadaan berkelanjutan dan tingginya ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap tekanan lingkungan dan ekonomi;
f. Belum terbangunnya kolaborasi efektif antar daerah dalam menerapkan kebijakan lingkungan dan pengadaan hijau yang mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

5. Isu Stategis RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen penting dalam pengendalian pembangunan daerah. Bagi Sekretariat Daerah, isu strategis RTRW muncul karena adanya ketidaksinkronan penataan ruang dengan perencanaan pembangunan lintas sektor. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih program antar-OPD, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik terpadu, serta pemanfaatan ruang untuk kepentingan strategis pemerintahan.

Sekretariat Daerah dituntut berperan aktif sebagai koordinator dalam menyelaraskan RTRW dengan dokumen perencanaan daerah lainnya (RPJMD, RKPD, Renstra OPD). Tanpa keterpaduan tersebut, arah pembangunan menjadi tidak efisien dan berisiko menimbulkan konflik tata ruang. Dengan demikian, isu strategis RTRW bagi Sekretariat Daerah adalah kurangnya sinkronisasi penataan ruang dengan perencanaan pembangunan, keterpaduan pelayanan publik, serta keterbatasan pemanfaatan ruang untuk mendukung birokrasi modern

6. Isu Strategis KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menekankan pentingnya aspek keberlanjutan, efisiensi, dan inklusivitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis KLHS di Sekretariat Daerah terutama terletak pada bagaimana memastikan kebijakan, rencana, dan program yang dikoordinasikan oleh Setda memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Masalah yang sering muncul adalah kurang optimalnya integrasi KLHS dalam dokumen perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga efisiensi kebijakan publik dan inklusivitas pembangunan belum sepenuhnya terwujud. Sekretariat Daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, isu strategis KLHS bagi Sekretariat Daerah adalah belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan berkelanjutan, efisiensi kebijakan publik, dan inklusivitas dalam perencanaan pembangunan.

**Tabel 3.0**

Daftar Isu Strategis Yang Bersumber Dari Telaah

| Potensi daerah yang menjadi kewenangan | Permasalahan Perangkat Daerah | Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah | Isu RTR yang relevan dengan Perangkat Daerah | Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah | | | Isu Strategis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Global | Nasional | Regional | |
| **Koordinasi lintas sektor pemerintahan daerah** | Lemahnya koordinasi antar-OPD | Tata kelola pemerintahan berkelanjutan | Penataan ruang yang belum sinkron lintas sektor | Global: Digitalisasi pemerintahan (e-government)Nasional: Reformasi birokrasi nasionalRegional: Ketimpangan antarwilayah | Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi program lintas OPD | **Koordinasi lintas sektor pemerintahan daerah** | Lemahnya koordinasi antar-OPD |
| **Potensi penguatan pelayanan publik terpadu** | Kurangnya sinkronisasi kebijakan | Efisiensi dan efektivitas kebijakan publik | Keterpaduan rencana tata ruang dengan pelayanan publik terpadu | Global: Tata kelola *good governance*Nasional: Integrasi perencanaan pembangunanRegional: Budaya kerja birokrasi yang belum optimal | Rendahnya kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik | **Potensi penguatan pelayanan publik terpadu** | Kurangnya sinkronisasi kebijakan |
| **Ketersediaan SDM birokrasi daerah** | SDM belum adaptif terhadap digitalisasi | Inklusivitas dalam perencanaan pembangunan | Keterbatasan pemanfaatan ruang untuk pengembangan infrastruktur pendukung birokrasi | Global: Isu perubahan iklim yang menuntut respons birokrasiNasional: SAKIP, RB, SPBERegional: Kebutuhan sinergi pusat-daerah | Kurangnya integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporanKinerja ASN belum berbasis meritInovasi pelayanan belum optimal | **Ketersediaan SDM birokrasi daerah** | SDM belum adaptif terhadap digitalisasi |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo yang ingin dicapai dalam jangka menengah, yakni selama periode lima tahun perencanaan. Tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam memastikan visi Kabupaten Probolinggo Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing dan misi Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif.

Adapun tujuan Sekretariat Daerah adalah rumusan umum mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, yang mencerminkan arah strategis dan fokus kinerja Sekretariat Daerah. Tujuan ini berorientasi pada pencapaian hasil yang mendukung visi Kabupaten Probolinggo Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing, misi Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi organisasi ke dalam rumusan yang lebih operasional dan terukur, sebagai arah pencapaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan disusun berdasarkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi serta memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo menetapkan 2 (dua) tujuan strategis sebagai berikut :

**Tujuan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah**

Tujuan ini diarahkan untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta menjawab tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat, efisien, dan berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan meningkatkan efektivitas kerja perangkat daerah serta memperkuat koordinasi antarbagian melalui sistem informasi yang terintegrasi.

Melalui penguatan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan kebijakan berbasis digital, Sekretariat Daerah berupaya menciptakan lingkungan pelayanan publik yang aman, inovatif, dan responsif. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan akan lebih transparan, mudah diakses, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

**Tujuan 2 : Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif**

Transformasi pelayanan publik yang inovatif dapat terwujud apabila pemerintah mampu menghadirkan layanan yang sederhana, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu didukung dengan kebijakan dan regulasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital yang aman dan terintegrasi, serta aparatur yang kompeten dan terbuka terhadap perubahan. Selain itu, dibutuhkan budaya inovasi yang mendorong kreativitas ASN, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam merancang dan mengevaluasi layanan. Dengan monitoring, evaluasi berkelanjutan, dan perbaikan berdasarkan data serta masukan publik, pelayanan publik yang

mudah diakses, inklusif, dan berkualitas akan lebih cepat terwujud.

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai selama periode lima tahun, yang mengarah pada hasil spesifik dan terukur. Sasaran ini berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan indikator kinerja dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. Untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dirumuskan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah**

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat peran Sekretariat Daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah melalui fungsi koordinasi, pembinaan administrasi, dan fasilitasi kebijakan. Setda membantu kepala daerah merumuskan kebijakan yang selaras dengan visi misi pembangunan, mendorong efisiensi birokrasi melalui penerapan SPBE, serta memperkuat akuntabilitas dengan pengawasan internal dan pelaporan kinerja. Selain itu, Setda memastikan sinkronisasi antar-perangkat daerah, meningkatkan kapasitas aparatur melalui manajemen SDM berbasis merit, serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembangunan. Dengan demikian, Setda berperan sebagai motor penggerak reformasi birokrasi sekaligus penopang utama terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel

**Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah**

Melalui sasaran ini, Sekretariat Daerah berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas tata kelola perangkat daerah melalui fungsi koordinasi, pengawasan, dan fasilitasi kebijakan dan memastikan setiap perangkat daerah menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pelaporan keuangan yang sesuai regulasi. Selain itu Sekretariat Daerah berperan melakukan pembinaan administrasi, sinkronisasi program lintas perangkat daerah, serta mendorong penerapan standar prosedur kerja dan sistem pengendalian internal. Dengan peran tersebut, Sekretariat Daerah menjadi penghubung sekaligus pengawas yang menjamin agar kinerja perangkat daerah lebih terukur, efisien, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik

**Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Sasaran ini merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini tercermin melalui pelayanan yang lebih cepat, tepat, transparan, serta mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Aparatur pemerintah dituntut untuk bersikap profesional, ramah, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, sehingga tercipta kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi pendorong penting dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta adanya standar pelayanan yang jelas membuat proses pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan tabel dibawah, terdapat 2 (dua) tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten

Probolinggo yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah,

Tujuan 2 : Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif.

Tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang digunakan sebagai capaian tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan untuk indikator sasaran menjadi tolak ukur dalam pencapaian sasaran strategis yang digunakan

**Tabel 3.1.**

Penjabaran Tujuan Dalam Sasaran Dan Indikator Sasaran Serta Target Kinerja Sasaran Dalam 5 Tahun Mendatang

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | |
| - Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah<br>- Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah dan Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Nilai SAKIP (Nilai) | 67,11 | 70,50 | 71,00 | 71,50 | 72,00 | 72,50 | 73,00 | |
| | | | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,45 | 4,51 | 4,55 | |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai) | 10,59 | 10,93 | 11,01 | 11,08 | 11,16 | 11,24 | 11,32 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Prosentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM diatas 85 (%) | 61 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |

Sumberdata : SIPD Bangda Tahun 2025

**Tujuan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah**

**Indikator Tujuan :** Nilai SAKIP

**Definisi Operasional :** Nilai SAKIP merupakan hasil penjumlahan dari 4 komponen yang dinilai dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal. Penilaian ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan sesuai prinsip akuntabilitas.

**Formula Perhitungan :** Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan pedoman KemenPAN-RB, yang disajikan dalam bentuk nilai angka serta predikat.

**Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah**

**Indikator Sasaran :** Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja

**Definisi Operasional :** Hasil penilaian SAKIP khusus pada aspek pelaporan kinerja, yang menilai kualitas laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

**Formula Perhitungan :** Penjumlahan nilai sub-komponen yang berkaitan dengan dokumen laporan kinerja.

**Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah**

**Indikator Sasaran :** Persentase kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah

**Definisi Operasional :** Persentase peningkatan nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja perangkat daerah dari tahun sebelumnya.

**Formula Perhitungan :** Nilai LHE AKIP tahun berjalan dikurangi nilai LHE AKIP tahun sebelumnya, kemudian dibagi nilai tahun sebelumnya, dikalikan 100%.

**Tujuan 2 : Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berdaya Saing**

**Indikator Tujuan :** Indeks Pelayanan Publik

**Definisi Operasional :** Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil pengukuran kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB berdasarkan formulir survei standar. Indeks ini mencerminkan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

**Formula Perhitungan :** 75% nilai Indeks dari Formulir 02 ditambah 25% nilai Indeks dari Formulir 03 sesuai metodologi KemenPAN-RB.

**Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

**Indikator Sasaran :** Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM minimal 85

**Definisi Operasional :** Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di atas 85, sebagai cerminan kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan.

**Formula Perhitungan :** (Jumlah perangkat daerah dengan nilai IKM ≥ 85 / Jumlah seluruh perangkat daerah) × 100%.

**Tabel 3.2**.
Definisi Operasional serta Formula Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran

| TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | Definisi Operasional Indikator Tujuan | Formula Perhitungan Indikator Tujuan | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Definisi Operasional Indikator Sasaran | Formula Perhitungan Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah | Nilai SAKIP | Hasil Penjumlahan dari 4 Komponen yang penilaian dari Kemenpan RB yaitu : (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Probolinggo dari Kemenpan RB | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja | Hasil Penilaian SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja | Hasil Penjumlahan Sub Komponen (Terdapat Dokumen Laporan Yang Menggambarkan Kinerja + Dokumen Laporan Kinerja Telah Memenuhi Standart Menggambarkan Atas Pencapaian Kinerja, Informasi Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Upaya Perbaikan/Penyempurnaannya+ Pelaporan Kinerja Telah Memberikan Dampak Yang Besar Dalam Penyesuaian Strategis/Kebijakan Dalam Mencapai Kinerja Berikutnya) |

| TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | Definisi Operasional Indikator Tujuan | Formula Perhitungan Indikator Tujuan | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Definisi Operasional Indikator Sasaran | Formula Perhitungan Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Indeks Pelayanan Publik | Nilai IPP merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan menggunakan instrumen (alat ukur) dalam bentuk kuesioner. Instrumen tersebut terbagi dalam Formulir 01 (formulir self assesment yang diisi oleh Unit lokus), Formulir 02 (formulir penilaian yang diisi evaluator), dan Formulir 03 (formulir yang diisi oleh pengguna layanan). Formulir 02 (formulir penilaian yang diisi evaluator) berisi 6 aspek penilaian dengan 30 indikator yang memiliki bobot yang berbeda. 6 aspek tersebut yaitu : Kebijakan Pelayanan (9 Indikatoor), Profesionalisme SDM (5 Indikator), Sarana dan Prasarana (6 Indikator), Sistem Infoormasi Pelayanan Publik (4 Indikator), Konsultasi dan Pengaduan (4 Indikator), Inovasi (2 | 75% Nilai Indeks Formulir 02+25% Nilai Indeks Formulir 03 pada PEKPP | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Persentase kenaikan nilai LHE akip pada th. N dibanding nilai lhe AKIP th. n-1 dikali 100% .Nilai Sakip adalah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. (PermenPAN RB nomor 88 tahun 2021) | nilai lhe akip th ke-n dikurngi nilai lhe akip th ke n-1/ nilai lhe akip th ke n-1 x 100% |

| TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | Definisi Operasional Indikator Tujuan | Formula Perhitungan Indikator Tujuan | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Definisi Operasional Indikator Sasaran | Formula Perhitungan Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Prosentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Minimal Diatas 85 | Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di atas 85 atau kategori mutu pelayanan yang baik | (Jumlah PD dengan nilai IKM PD diatas 85 pada tahun n /Jumlah semua PD yang melakukan IKM) dikali 100% |

### 3.2. Strategi Sekretariat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan arah kebijakan operasional yang disusun secara sistematis untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Strategi ini menjadi kerangka acuan dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Strategi per kepala bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1. Bagian Pemerintahan Strategi :
   a. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
   b. Menyusun dan memutakhirkan data kewilayahan serta fasilitasi penyelesaian batas wilayah;
   c. Memperkuat sistem administrasi pemerintahan berbasis digital untuk mendukung tata kelola yang efektif;
   d. Mengoptimalkan fasilitasi kerja sama antar daerah dan luar negeri.
2. Bagian Hukum Strategi :
   a. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah;
   b. Mengembangkan system dokumentasi dan informasi hukum berbasis digital;
   c. Meningkatkan kapasitas SDM hukum melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Strategi :
   a. Memfasilitasi peningkatan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial berbasis kebutuhan masyarakat;
   b. Mendorong peran serta masyarakat dan lembaga keagamaan dalam pembangunan sosial dan spiritual;
   c. Mengoptimalkan program perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.
4. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Strategi:
   a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan investasi;
   b. Memfasilitasi kerja sama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pemanfaatan SDA berkelanjutan;
   c. Mengembangkan inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan.
5. Bagian Administrasi Pembangunan Strategi:
   a. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah agar lebih terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD;
   b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi (monev) program/kegiatan agar sasaran pembangunan tercapai tepat waktu dan tepat guna;
   c. Memanfaatkan teknologi informasi untuk pelaporan kinerja pembangunan secara real time dan transparan.

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Strategi:
   a. Menerapkan sistem pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip e-procurement;
   b. Mengutamakan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM dalam proses pengadaan;
   c. Meningkatkan kapasitas dan integritas pejabat pengadaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang;
   d. Meningkatkan kompetensi SDM pengadaan melalui pelatihan dan sertifikasi;
   e. Mengembangkan sistem informasi pengadaan secara digital dan real-time.
7. Bagian Umum Strategi :
   a. Mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
   b. Mengoptimalkan layanan administrasi perkantoran, tata naskah dinas, kehumasan, serta pengelolaan rumah tangga untuk mendukung kelancaran birokrasi;
   c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam surat-menyurat, arsip digital, dan layanan internal agar lebih cepat, tepat, dan transparan;
   d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan administras.
8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Strategi :
   a. Meningkatkan tata kelola keprotokolan dan komunikasi publik untuk mendukung efektivitas kepemimpinan kepala daerah;
   b. Optimalisasi diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media massa, media sosial, dan publikasi resmi;
   c. Memperkuat hubungan kerja sama dan koordinasi lintas stakeholder demi citra positif pemerintahan.
9. Bagian Organisasi Strategi :
   a. Melakukan analisis kelembagaan, ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah agar lebih efisien;
   b. Penyusunan kebijakan reformasi birokrasi, penguatan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP), serta monitoring capaian kinerja perangkat daerah;
   c. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat.

**Table 3.3**

Penahapan Pembangunan

| TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | TAHAP V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Penguatan pondasi koordinasi dan fasilitasi kebijakan strategis lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas pelayanan administrasi, serta optimalisasi peran Sekretariat Daerah dalam mendukung daya saing Kabupaten | Percepatan penguatan sistem koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi, disertai penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Sekretariat Daerah untuk mendukung transformasi sosial ekonomi inklusif | Pemantapan tata kelola Sekretariat Daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel, melalui percepatan implementasi sistem pelayanan administrasi modern serta penguatan fungsi pengendalian kebijakan lintas sektor | Pemantapan peran Sekretariat Daerah sebagai pusat kendali koordinasi, transformasi birokrasi, dan fasilitasi pelayanan publik, didukung sinergi kuat antar-perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas | Perwujudan Sekretariat Daerah yang adaptif, modern, dan berkelanjutan sebagai motor penggerak tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat |

## 3.3. Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah merupakan rumusan umum mengenai pendekatan dan prioritas kebijakan yang akan diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administratif, serta menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan dukungan administrasi, tata usaha, dan kerumahtanggaan pemerintah daerah. Langkah strategis diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan perkantoran, pengelolaan sarana prasarana, serta tata naskah dinas berbasis teknologi informasi. Hal ini guna menjamin kelancaran operasional birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Meningkatan kualitas kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah sesuai kebutuhan pembangunan. Fokus utamanya mencakup penyederhanaan struktur birokrasi, optimalisasi evaluasi kelembagaan, serta penguatan sistem kerja yang adaptif. Upaya ini juga didukung pengembangan kompetensi aparatur sehingga terbentuk birokrasi yang profesional dan berdaya saing;
3. Penguatan fungsi komunikasi publik dan keprotokolan. Strategi diarahkan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan keprotokolan, publikasi kegiatan kepala daerah, serta diseminasi informasi pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif. Pemanfaatan media digital juga diperluas untuk mendukung citra positif pemerintahan dan meningkatkan kedekatan pemerintah dengan masyarakat;

4. Peningkatan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah. Langkah strategis diarahkan pada pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi sehingga memudahkan proses pengendalian program/kegiatan. Dengan demikian, capaian pembangunan dapat lebih terukur, akuntabel, dan sesuai target RPJMD;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Strategi meliputi penguatan fasilitasi administrasi kewilayahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta peningkatan koordinasi hubungan antarlembaga. Dengan ini diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang tertib, efektif, dan harmonis;
6. Peningkatan kualitas produk hukum daerah, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya. Upaya ini ditempuh melalui penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan, fasilitasi bantuan hukum, serta penguatan budaya sadar hukum. Hal ini untuk mewujudkan kepastian hukum yang mendukung terciptanya pemerintahan yang tertib dan akuntabel;
7. peningkatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat. Fokus utama meliputi pelayanan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat kualitas kehidupan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial sesuai target RPJMD;
8. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di sektor ekonomi dan sumber daya alam. Strategi difokuskan pada peningkatan iklim investasi, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), penguatan ketahanan pangan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan ini, pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipacu sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Probolinggo;
9. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Strategi difokuskan pada penguatan sistem pengadaan berbasis elektronik (e-procurement), peningkatan kapasitas SDM pengelola PBJ, serta pencegahan praktik korupsi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pengadaan yang bersih, adil, dan mendukung pembangunan daerah.

**Tabel 3.4**
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan kualitas administrasi, tata usaha, serta dukungan teknis perkantoran berbasis teknologi informasi. Standar meliputi penerapan sistem persuratan elektronik, tata naskah dinas digital, dan pengelolaan arsip modern. Prosedur mencakup pencatatan, pendistribusian, dan pengarsipan dokumen dengan aplikasi digital. Kriteria keberhasilan terlihat dari meningkatnya efisiensi layanan administrasi, ketersediaan data arsip yang terdokumentasi baik, serta pelayanan administrasi yang lebih cepat dan akuntabe | Membangun pemerintah yang bersih dan anti korupsi (Zona Integritas) dengan penilaian kinerja pegawai yang lebih terukur | Penguatan dukungan administrasi, tata usaha, dan kerumahtanggaan pemerintah daerah. Langkah strategis diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan perkantoran, pengelolaan sarana prasarana, serta tata naskah dinas berbasis teknologi informasi. Hal ini guna menjamin kelancaran operasional birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel; |
| 2 | Optimalisasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan tata laksana pemerintahan. Standar meliputi penyusunan analisis jabatan, evaluasi kelembagaan, dan penerapan SOP digital. Prosedur dijalankan melalui kajian organisasi, penyusunan rekomendasi kelembagaan, serta implementasi SOP dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kriteria keberhasilan ditandai dengan organisasi perangkat daerah yang adaptif, kinerja aparatur yang profesional, serta meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan | Menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung teknologi informasi yang inovatif untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan public sampai tingkat desa | Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah sesuai kebutuhan pembangunan. Fokus utamanya mencakup penyederhanaan struktur birokrasi, optimalisasi evaluasi kelembagaan, serta penguatan sistem kerja yang adaptif. Upaya ini juga didukung pengembangan kompetensi aparatur sehingga terbentuk birokrasi yang profesional dan berdaya saing; |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA |
|---|---|---|---|
| 3 | Optimalisasi peningkatan kualitas layanan keprotokolan dan komunikasi publik pemerintah daerah. Standar meliputi penyelenggaraan protokoler sesuai ketentuan, publikasi informasi berbasis digital, serta strategi komunikasi publik yang partisipatif. Prosedur dilakukan melalui pengelolaan agenda pimpinan, penyampaian informasi resmi, dan publikasi kebijakan melalui media online maupun offline. Kriteria keberhasilan terlihat dari meningkatnya kualitas layanan protokoler, citra positif pemerintah daerah, serta keterlibatan publik yang lebih luas dalam pembangunan daerah | Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara terbuka bersama masyarakat. | Penguatan fungsi komunikasi publik dan keprotokolan. Strategi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan, publikasi kegiatan kepala daerah, serta diseminasi informasi pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif. Pemanfaatan media digital juga diperluas untuk mendukung citra positif pemerintahan dan meningkatkan kedekatan pemerintah dengan masyarakat; |
| 4 | Menyusun dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah yang berbasis data. Standar meliputi penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, aplikasi monitoring kinerja, dan evaluasi yang terukur. Prosedur dilakukan melalui koordinasi penyusunan perencanaan, input data pada aplikasi perencanaan, serta evaluasi capaian program dan kegiatan. Kriteria keberhasilan ditandai dengan meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, akurasi data pembangunan, serta terwujudnya monitoring pembangunan yang transparan dan akuntabel | Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara terbuka bersama masyarakat. | Peningkatan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah. Langkah strategis diarahkan pada pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi sehingga memudahkan proses pengendalian program/kegiatan. Dengan demikian, capaian pembangunan dapat lebih terukur, akuntabel, dan sesuai target RPJMD; |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA |
|---|---|---|---|
| 5 | Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif hingga ke tingkat desa. Standar yang digunakan adalah penerapan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pelaksanaan koordinasi lintas sektor, dan penguatan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Prosedur dijalankan melalui sinkronisasi program antar perangkat daerah, forum koordinasi berkala, dan monitoring kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Kriteria keberhasilan diukur dari meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah, tersedianya data pemerintahan yang valid, serta meningkatnya kapasitas desa dalam melayani masyarakat | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan, pembangunan. | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Strategi meliputi penguatan fasilitasi administrasi kewilayahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta peningkatan koordinasi hubungan antarlembaga. Dengan ini diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang tertib, efektif, dan harmonis; |
| 6 | Menyusun regulasi dan pemberian layanan hukum yang menjamin kepastian serta keadilan. Standar meliputi penyederhanaan produk hukum, digitalisasi dokumentasi, dan penerapan konsultasi hukum berbasis aplikasi. Prosedur mencakup proses harmonisasi, fasilitasi rancangan peraturan, serta penguatan dokumentasi hukum secara transparan. Kriteria keberhasilan terlihat dari jumlah regulasi yang terharmonisasi dengan baik, meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan, serta tersedianya layanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan, pembangunan. | Peningkatan kualitas produk hukum daerah, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya. Upaya ini ditempuh melalui penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan, fasilitasi bantuan hukum, serta penguatan budaya sadar hukum. Hal ini untuk mewujudkan kepastian hukum yang mendukung terciptanya pemerintahan yang tertib dan akuntabel |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA |
|---|---|---|---|
| 7 | Meningkatkan pelayanan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Standar pelayanan mencakup digitalisasi hibah, bansos, serta fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan. Prosedur dilaksanakan melalui pendataan penerima bantuan yang transparan, proses verifikasi berbasis sistem, serta monitoring penyaluran hibah dan bansos. Kriteria keberhasilan ditandai dengan meningkatnya transparansi penyaluran bantuan, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan sosial, serta terjaminnya akses layanan keagamaan dan sosial hingga tingkat desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan, pembangunan. | Melakukan peningkatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat. Fokus utama meliputi pelayanan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat kualitas kehidupan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial sesuai target RPJMD; |
| 8 | Menekankan fasilitasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan ekonomi daerah yang berorientasi pada investasi, UMKM, ketahanan pangan, dan pengelolaan SDA berkelanjutan. Standar meliputi sistem informasi ekonomi terintegrasi, target peningkatan investasi, serta indikator penguatan ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Prosedur dilaksanakan melalui forum koordinasi lintas perangkat daerah, fasilitasi kemitraan investasi, pendataan UMKM, serta monitoring ketersediaan pangan dan pengelolaan SDA. Kriteria keberhasilan tercermin dari meningkatnya investasi, berkembangnya UMKM, terjaminnya ketersediaan pangan, serta pengelolaan SDA yang menjaga daya dukung lingkungan | Sinkronisasi dan integrasi substansi perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan daerah lainnya | Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di sektor ekonomi dan sumber daya alam. Strategi difokuskan pada peningkatan iklim investasi, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), penguatan ketahanan pangan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan ini, pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipacu sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Probolinggo; |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA |
|---|---|---|---|
| 9 | penyelenggaraan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Standar pelaksanaannya adalah optimalisasi sistem e-procurement sesuai regulasi nasional. Prosedur meliputi perencanaan kebutuhan, pelaksanaan tender elektronik, hingga monitoring hasil pengadaan secara terbuka. Kriteria keberhasilan diukur dari meningkatnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah, meningkatnya profesionalisme pengelola pengadaan, serta berkurangnya potensi permasalahan hukum dalam pengadaan barang/jasa | Membangun pemerintah yang bersih dan anti korupsi (Zona Integritas) dengan penilaian kinerja pegawai yang lebih terukur | Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Strategi difokuskan pada penguatan sistem pengadaan berbasis elektronik (e-procurement), peningkatan kapasitas SDM pengelola PBJ, serta pencegahan praktik korupsi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pengadaan yang bersih, adil, dan mendukung pembangunan daerah |

# BAB IV

# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif, mengelola program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan secara umum.

Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini meliputi kegiatan administratif dan teknis yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan. Program ini mencakup berbagai kegiatan administratif dan operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Meliputi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun, bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada PD : Meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD, rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD dan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : Termasuk koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi serta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah : Meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD serta penataan arsip dinamis pada SKPD;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Termasuk pengadaan kendaraan dinas perorangan dan operasional lapangan, mebel, peralatan dan mesin lainnya,

serta sarana dan prasarana gedung kantor;

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Meliputi penyediaan jasa surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, komunikasi sumberdaya air dan listrik serta pelayanan umum kantor;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Meliputi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan kendaraan operasional dan lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin, rehabilitasi sarana dan prasaran gedung kantor dan bangunan serta pemeliharaan mebel;
9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : Penyediaan gaji dan tunjangan, pakaian dinas dan atribut kelengkapan, pelaksanaan medical chekup, serta dana penunjang kepala daerah dan wakil kepala daerah;
10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah : Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretariat daerah;
11. Penataan Organisasi : Termasuk pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, peningkatan kinerja reformasi birokrasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana serta koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;
12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan : Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan pendokumentasian tugas pimpinan.

B. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini berfokus pada penataan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan administrasi pemerintahan, fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dan penguatan sistem hukum daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan:

1. Administrasi Tata Pemerintahan : Meliputi penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat : Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum : Termasuk fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi bantuan hokum serta pendokumentasian produk hukum, dan pengelolaan informasi hukum.

C. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini bertujuan mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan kebijakan perekonomian, pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian ekonomi mikro kecil, fasilitasi dan pengawasan program pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan

kebijakan sumber daya alam di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, energi, dan lingkungan hidup. Program ini fokus pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan:

1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan : Fasilitasi penyusunan program pembangunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan, serta pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
2. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian : Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil;
3. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam : Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi, dan air,
4. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa : Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

**Tabel 4.1**

Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah** | | | | | | | |
| - Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah<br>- Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah dan Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Nilai SAKIP (Nilai) | | |
| | | | | | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dna Pelaporan Bid Umum | | Persentase Kebijakan di bidang TU pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, RT dan perlengkapan yang dilaksanakan (%) | 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun Benar dan Tepat Waktu | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 4.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Tersediannya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Benar | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 4.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Umum PD yang terlaksana | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |
| | | | | Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaranTugas dan Fungsi PD yang diadakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terselenggaranya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang terlaksana | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Terselenggaranya Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Fasilitasi administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang) | 4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang) | 4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |
| | | | | Fasilitasi kebutuhan kerumahtanggan KDH,WDH, dan Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Prokopim | | Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana (%) | 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan kepada KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan) | 4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan) | 4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan) | 4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan) | 4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan) | 4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan) | 4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan | |
| | | | Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesra | | Persentase kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana (%) | 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | | | | Meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen) | 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen) | 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen) | 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen) | 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen) | 4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen) | 4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dna Pelaporan Bidang Hukum | | Persentase implementasi Renaksi Peningkatan IRH (%) | 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | | | | | Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana (%) | 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | | | | Meningkatnya kualitas pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus) | 4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | |
| | | | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | 4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | |
| | | | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | 4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | |
| | | | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | 4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus) | 4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum | |
| | | | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | 4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan<br><br>Pengelolaan Informasi Hukum | |
| | | | Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan | | Persentase kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi Kewilayahan dan otonomi serta Kerjasama daerah yang terlaksana (%) | 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | | | | Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen) | 4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen) | 4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen) | 4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen) | 4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | |
| | | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kerja sama tentang pelayanan publik | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen) | 4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen) | 4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | |
| | | | Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Adminitrasi Pembangunan | | Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi serta pelaporan yang terlaksana (%) | 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | |
| | | | | Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen) | 4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan) | 4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen) | 4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan) | 4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian dan SDA | | Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian, dan sumber daya alam yang terlaksana (%) | 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | |
| | | | | Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | 4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | 4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | 4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | 4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | |
| | | | | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | 4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | 4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | |
| | | | | Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen) | 4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen) | 4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen) | 4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen) | 4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen) | 4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen) | 4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | |
| | | | Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan BidangPengadaan Barang dan Jasa | | Persentase kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektornik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana (%) | 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | |
| | | | | Meningkatkan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | 4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | 4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | 4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | 4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | 4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | 4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah | | | Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai) | | |
| | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD | | Persentase PD dengan Nilai Pelaporan Kinerja minimal 11 Pada LHE AKIP PD (%) | 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Peningkatan perangkat daerah dengan tingkat kematangan minimal sedang, Peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan prima, Peningkatan kualitas pelaporan akuntabilitas perangkat daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | 4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) | 4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) | 4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) | 4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | |
| | | | Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bid Kelembagaan dan Anjab, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan RB | | Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana (%) | 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | | Persentase PD dengan Nilai IKM minimal diatas 85 (%) | 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Peningkatan perangkat daerah dengan tingkat kematangan minimal sedang, Peningkatan kualitas pelaporan akuntabilitas perangkat daerah dan Peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan prima | | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |
| | | | | | | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | Prosentase PD dengan Nilai IKM diatas 85 (%) | | |
| | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD | | Persentase PD dengan Nilai Pelaporan Kinerja minimal 11 Pada LHE AKIP PD (%) | 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Peningkatan perangkat daerah dengan tingkat kematangan minimal sedang, Peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan prima, Peningkatan kualitas pelaporan akuntabilitas perangkat daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | 4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) | 4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) | 4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) | 4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | |
| | | | Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bid Kelembagaan dan Anjab, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan RB | | Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana (%) | 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | | Persentase PD dengan Nilai IKM minimal diatas 85 (%) | 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Peningkatan perangkat daerah dengan tingkat kematangan minimal sedang, Peningkatan kualitas pelaporan akuntabilitas perangkat daerah dan Peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan prima | | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |
| | | | | | | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |

**Tabel 4.2**

Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA | Nilai LHE AKIP SETDA Komponen Pelaporan Kinerja | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja | Penghitungan komponen manajemen kinerja dikali bobot | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Benar dan Tepat Waktu | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Setda Yang Tersusun Benar dan Tepat Waktu | (Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Benar dan Tepat Waktu/jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja) dikali 100% | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan yang memuat rencana kerja Tahunan yang disusun sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah | (Jumlah dokumen yang telah disusun/jumlah dokumen yang telah direncanakan) dikali 100% |
| | | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA | Persentase Kebijakan di bidang TU pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, RT dan perlengkapan yang dilaksanakan | Ukuran persentase keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program kerja yang telah direncanakan dalam bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan selama periode tertentu | Persentase Kebijakan di Bidang TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Keuangan, RT dan Perlengkapan yang Dilaksanakan = (Jumlah Target Kebijakan yang Tercapai / Jumlah Target Kebijakan) x 100% | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun Benar dan Tepat Waktu | Seluruh proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan | (Jumlah dokumen/aktivitas administrasi keuangan yang dilaksanakan dengan benar / Jumlah keseluruhan yang seharusnya) x 100% | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah proses perhitungan, pengajuan, dan pencairan hak keuangan bagi ASN sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan lainnya | Jumlah total ASN yang menerima gaji dan/atau tunjangan selama periode pelaporan (bulanan/triwulanan/tahunan) |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kegiatan yang meliputi penyusunan, verifikasi, dan rekonsiliasi data transaksi keuangan serta pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku | Jumlah dokumen akuntansi hasil koordinasi dan pelaksanaan yang dihasilkan dan disahkan selama periode pelaporan |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kegiatan yang mencakup koordinasi antar unit kerja dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun, termasuk kompilasi, verifikasi, dan finalisasi laporan sesuai ketentuan perundang-undangan | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang telah disusun dan laporan hasil kegiatan koordinasi penyusunan yang terdokumentasi |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kegiatan yang mencakup proses koordinasi internal dalam penyusunan laporan keuangan secara periodik (bulanan, triwulanan, dan semesteran), meliputi pengumpulan data, verifikasi, dan penyusunan laporan sesuai standar akuntansi pemerintah | Jumlah laporan keuangan periodik (bulanan, triwulanan, semesteran) yang disusun + jumlah dokumentasi hasil koordinasi |
| | | | | | | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kegiatan penyusunan laporan dan analisis atas capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan, termasuk estimasi proyeksi sisa anggaran sampai akhir periode | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis yang disusun dan didokumentasikan dalam periode pelaporan tertentu |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Benar | Proses pencatatan, pemeliharaan dokumen, dan pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah secara tertib dan sistematis oleh Perangkat Daerah sesuai regulasi yang berlaku. | (Jumlah dokumen administrasi BMD yang lengkap / Jumlah dokumen yang seharusnya tersedia) x 100% | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Proses penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah oleh SKPD berdasarkan analisis kebutuhan operasional, ketersediaan barang, usia pakai, dan prioritas pelayanan publik. | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) yang disusun dan disahkan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran. |
| | | | | | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Proses mencocokkan data pengelolaan BMD antara SKPD dan BPKAD yang dilanjutkan dengan penyusunan laporan BMD, seperti KIB, KIR, dan laporan lainnya sesuai ketentuan Permendagri | Jumlah kegiatan rekonsiliasi dan laporan yang tersusun |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Serangkaian kegiatan administrasi yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Jumlah aspek penatausahaan yang dilaksanakan |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Proses pengelolaan dokumen dan data kepegawaian secara administratif oleh Perangkat Daerah, yang mencakup pengangkatan, mutasi, cuti, penilaian kinerja, pensiun, dan kehadiran pegawai | (Jumlah dokumen/administrasi kepegawaian yang tertata rapi dan lengkap / Jumlah dokumen yang seharusnya tersedia) x 100% | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Proses pengelolaan data kepegawaian berbasis sistem informasi yang mencakup koordinasi antar unit, pemutakhiran data, serta pemanfaatan aplikasi kepegawaian (seperti SIMPEG) oleh Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan koordinasi dan input/update data kepegawaian yang dilakukan |
| | | | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kegiatan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan masing-masing, untuk mendukung kinerja dan profesionalitas ASN | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi |
| | | | | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kegiatan penyampaian informasi dan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan kepada aparatur pemerintah atau masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap regulasi | Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | % kegiatan Administrasi Umum PD yang terlaksana | Kegiatan pencatatan, pengarsipan, dan pengelolaan surat-menyurat, dokumen dinas, dan penyusunan laporan administrasi lainnya yang mendukung fungsi organisasi secara menyeluruh di Perangkat Daerah | (Jumlah aspek administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar / Jumlah aspek yang seharusnya dilakukan) x 100% | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan komponen instalasi listrik serta sistem penerangan di lingkungan bangunan kantor untuk menjamin kelancaran operasional dan kenyamanan kerja. | Jumlah Paket komponen listrik/penerangan yang tersedia dan berfungsi baik |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kegiatan pengadaan, pencatatan, dan distribusi peralatan serta perlengkapan kantor seperti meja, kursi, komputer, printer, dan alat penunjang kerja lainnya guna mendukung operasional perangkat daerah | Jumlah Paket peralatan/perlengkapan yang tersedia sesuai kebutuhan |
| | | | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi peralatan rumah tangga kantor (seperti meja, kursi, lemari, dispenser, AC, dll) guna mendukung kelancaran operasional unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah. | Jumlah Paket peralatan yang tersedia sesuai kebutuhan |
| | | | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Proses perencanaan, pengadaan, dan distribusi bahan logistik yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran, seperti alat tulis kantor (ATK), bahan kebersihan, konsumsi rapat, dan perlengkapan kerja lainnya. | Jumlah Paket bahan logistik tersedia sesuai kebutuhan |
| | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kegiatan pengadaan dan distribusi barang cetakan serta penggandaan dokumen yang mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan di lingkungan SKPD, seperti buku, formulir, laporan, surat edaran, dan dokumen lainnya. | Jumlah Paket barang cetakan/penggandaan yang tersedia sesuai kebutuhan |
| | | | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kegiatan pelayanan dan penyediaan kebutuhan administratif maupun logistik yang berkaitan dengan penerimaan tamu dinas, baik dari dalam maupun luar instansi, sebagai bagian dari fungsi pelayanan dan komunikasi kelembagaan. | Jumlah Laporan kunjungan tamu yang difasilitasi sesuai standar |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh SKPD untuk menyamakan persepsi, membahas isu strategis, dan menyusun langkah koordinatif maupun konsultatif antar unit kerja maupun dengan instansi lain | Jumlah Laporan rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan |
| | | | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Proses pengelolaan arsip dinamis yang mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip aktif dan inaktif oleh SKPD sesuai dengan kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan. | Jumlah Dokumen aspek pengelolaan arsip yang dilakukan sesuai ketentuan |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % Pengadaan Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaranTugas dan Fungsi PD yang diadakan | Proses perencanaan dan pengadaan barang milik daerah (BMD) yang digunakan sebagai aset penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | (Jumlah nilai atau volume BMD yang berhasil diadakan / Jumlah nilai atau volume BMD yang direncanakan) x 100% | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Kegiatan pengadaan kendaraan dinas yang digunakan secara individual oleh pejabat struktural sesuai dengan ketentuan jabatan dan peraturan perundang-undangan mengenai kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan yang berhasil diadakan sesuai kebutuhan jabatan |
| | | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Kegiatan pengadaan kendaraan dinas yang digunakan untuk menunjang operasional lapangan perangkat daerah, termasuk kendaraan fungsional yang digunakan untuk mobilitas tugas teknis, pelayanan masyarakat, pengawasan, dan penanganan cepat di lapangan | Jumlah kendaraan operasional yang diadakan |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kegiatan pengadaan perabot kantor seperti meja, kursi, lemari, rak, dan perlengkapan mebel lainnya untuk menunjang kenyamanan dan efisiensi kerja di lingkungan perangkat daerah | Jumlah paket mebel yang diadakan sesuai kebutuhan |
| | | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kegiatan pengadaan berbagai jenis peralatan dan mesin selain kendaraan dan mebel, yang digunakan untuk mendukung operasional perangkat daerah, seperti komputer, printer, alat pemotong, scanner, AC, genset, dan sejenisnya | Jumlah unit peralatan/mesin yang diadakan sesuai kebutuhan |
| | | | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kegiatan pengadaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana penunjang fungsi gedung kantor atau bangunan lainnya, termasuk renovasi, perbaikan, dan penyediaan fasilitas pendukung seperti sistem sanitasi, instalasi air, parkir, aksesibilitas, dan ruang pelayanan | Jumlah unit sarana/prasarana yang disediakan sesuai rencana |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang terlaksana | Kegiatan pengadaan layanan atau jasa yang mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, seperti jasa kebersihan, keamanan, pemeliharaan, konsultan, dan jasa teknis lainnya | (Jumlah jasa penunjang yang disediakan sesuai kebutuhan / Jumlah jasa penunjang yang direncanakan) x 100% | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kegiatan penyediaan layanan administrasi surat-menyurat, baik secara manual maupun elektronik, yang mencakup pencatatan, pengiriman, penerimaan, distribusi, dan pengarsipan surat dinas guna mendukung kelancaran komunikasi kedinasan | Jumlah Laporan layanan surat-menyurat yang dilaksanakan sesuai prosedur |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kegiatan penyediaan layanan terkait dengan pengadaan, instalasi, pemeliharaan, dan/atau perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor guna memastikan kelancaran operasional perangkat daerah | Jumlah Laporan layanan peralatan/perlengkapan kantor yang diberikan sesuai kebutuhan |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kegiatan penyediaan layanan rutin terkait komunikasi (telepon, internet), pasokan air bersih, dan listrik guna menunjang aktivitas operasional kantor secara berkelanjutan dan efisien | Jumlah Laporan hari layanan tersedia tanpa gangguan |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kegiatan penyediaan layanan pendukung yang bersifat umum di lingkungan kantor, seperti jasa kebersihan, keamanan, transportasi internal, dan pelayanan pendukung lainnya yang menunjang kenyamanan dan kelancaran operasional harian perangkat daerah | Jumlah laporan jenis layanan umum yang tersedia dan berjalan baik |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik | Kegiatan pemeliharaan terhadap aset/barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik berupa peralatan, kendaraan, mesin, maupun sarana prasarana lainnya agar tetap berfungsi optimal dan memiliki umur pakai yang sesuai | (Jumlah BMD yang dipelihara / Jumlah BMD yang direncanakan untuk dipelihara) x 100% | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kegiatan yang mencakup penyediaan jasa perawatan rutin, perbaikan, serta pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang digunakan oleh pejabat struktural sesuai peraturan, guna menjaga kondisi kendaraan tetap optimal dan sah secara hukum | Jumlah kendaraan jabatan yang dirawat dan dibayarkan pajaknya |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kegiatan yang mencakup penyediaan layanan pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan, termasuk pengeluaran untuk biaya servis rutin, penggantian suku cadang, pembayaran pajak kendaraan, dan pengurusan perizinan kendaraan agar tetap layak jalan dan sesuai ketentuan hukum | Jumlah kendaraan yang dipelihara dan diperpanjang izinnya |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, dan/atau perbaikan terhadap peralatan dan mesin lainnya milik pemerintah daerah guna menjaga agar tetap dalam kondisi baik, berfungsi optimal, dan memiliki umur pakai yang sesuai standar operasional | Jumlah peralatan/mesin yang dipelihara |
| | | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kegiatan yang mencakup pemeliharaan rutin, berkala, atau rehabilitasi terhadap gedung kantor dan bangunan lainnya milik pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan kondisi fisik, fungsi, serta kelayakan bangunan guna mendukung operasional pemerintahan | Jumlah kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi yang terlaksana |
| | | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, maupun rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya untuk memastikan bangunan tetap layak fungsi, aman, dan nyaman dalam mendukung kegiatan pemerintahan. Termasuk perbaikan struktur, pengecatan, penggantian instalasi, dan sebagainya | Jumlah kegiatan pemeliharaan yang terealisasi |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel Yang Dipelihara | Kegiatan pemeliharaan terhadap perabotan/mebel kantor seperti meja, kursi, lemari, dan perlengkapan kerja lainnya untuk menjaga kondisi dan fungsinya agar tetap layak digunakan dalam mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran. | Jumlah mebel yang dipelihara |
| | | | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | % Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi | Kegiatan yang mencakup pengelolaan administrasi keuangan serta dukungan operasional secara menyeluruh bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, penggunaan dana operasional, serta pencatatan kegiatan kedinasan | (Jumlah dokumen administrasi keuangan & operasional yang lengkap dan tepat waktu / Jumlah dokumen yang direncanakan) x 100% | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kada | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kegiatan pemberian hak keuangan berupa gaji pokok dan tunjangan-tunjangan (seperti tunjangan jabatan, tunjangan operasional, dan tunjangan lainnya) yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rutin setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Jumlah Orang yang menerima gaji bulanan & tunjangan dibayarkan tepat waktu |
| | | | | | | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (seperti tanda pangkat, lambang jabatan, topi, sepatu, dan lain-lain) yang digunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Jumlah paket pakaian dan atribut yang disediakan sesuai standar |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kegiatan pemeriksaan kesehatan menyeluruh (medical check up) yang dilakukan secara berkala bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah guna memastikan kondisi kesehatan prima dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Orang pemeriksaan yang dilaksanakan |
| | | | | | | | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kegiatan penyediaan dan penggunaan dana operasional yang dialokasikan khusus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi kegiatan koordinasi, representasi, dan kegiatan kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Orang yang menerima penggunaan dana operasional |
| | | | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | % kebutuhan kerumahtanggan KDH,WDH, dan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi | Kegiatan penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan yang mencakup pengelolaan kebersihan, keamanan, pemeliharaan fasilitas, tata ruang, konsumsi, dan kebutuhan operasional lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan daerah | (Jumlah layanan kerumahtanggaan yang terlaksana sesuai standar / Jumlah layanan kerumahtanggaan yang direncanakan) x 100% | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Kegiatan penyediaan barang dan jasa untuk mendukung kebutuhan rumah tangga jabatan Kepala Daerah, seperti bahan makanan, perlengkapan rumah tangga, jasa kebersihan, keamanan, kendaraan dinas, dan layanan penunjang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku | Jumlah Paket kebutuhan Kepala Daerah yang dipenuhi sesuai standar |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Kegiatan penyediaan barang dan jasa untuk mendukung kebutuhan rumah tangga jabatan Wakil Kepala Daerah, seperti bahan makanan, perlengkapan rumah tangga, jasa kebersihan, keamanan, kendaraan dinas, dan layanan penunjang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku | Jumlah Paket kebutuhan Wakil Kepala Daerah yang dipenuhi sesuai standar |
| | | | | | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan RumahTangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Kegiatan penyediaan barang dan jasa untuk mendukung kebutuhan operasional rumah tangga di lingkungan Sekretariat Daerah, seperti bahan konsumsi, perlengkapan kebersihan, perlengkapan dapur, serta jasa kebersihan dan layanan lainnya yang menunjang aktivitas harian | Jumlah Paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang terpenuhi |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA | Rata-Rata Nilai LHE AKIP PD Komponen Pelaporan Kinerja | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada komponen pelaporan kinerja | Penjumlahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah komponen pelaporan kinerja | Penataan Organisasi | Jumlah Perangkat Daerah Dengan Tingkat Kematangan Minimal Sedang | Menghitung jumlah PD yang memperoleh tingkat kematangan minimal sedang (skor minimal 28,1) | Jumlah perangkat daerah dengan tingkat kematangan minimal sedang | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan yang tersusun pada tahun ke n | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan yang tersusun |
| | Persentase PD dengan Nilai Pelaporan Kinerja minimal 11 pada LHE AKIP PD | Persentase yang menunjukan Jumlah PD dengan Nilai LHE AKIP Komponen Pelaporan Kinerja minimal 11 dibanding Jumlah seluruh PD | Jumlah PD dengan nilai pelaporan kinerja minimal 11 pada LHE AKIP/ jumlah seluruh PD x 100 % | | Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja PD Yang Berkualitas dan Tepat Waktu | Persentase yang menunjukkan jumlah PD yang menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja yang berkualitas (sesuai dengan regulasi dan Tepat Waktu) dibandingkan dengan jumlah seluruh PD | Jumlah PD dengan Dokumen Laporan Kinerja PD Yang berkualitas (sesuai dengan regulasi dan Tepat Waktu)/ jumlah seluruh PD x 100 % | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Laporan hasil fasilitasi pelayanan publik khususnya pada rancangan kebijakan terkait Pelayanan Publik dan Tata Laksana sesuai regulasi yang berlaku dan pengarsipan dokumen secara manual dan digital. | Jumlah seluruh laporan hasil fasilitasi pelayanan publik khususnya pada rancangan kebijakan terkait Pelayanan Publik dan Tata Laksana sesuai regulasi yang berlaku dan pengarsipan dokumen secara manual dan digital dalam 1 tahun |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana | Persentase yang menunjukkan jumlah kebijakan/ keputusan yang dirancang dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan atau dijalankan dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan total kebijakan yang direncanakan dalam bidang-bidang tersebut. | Jumlah kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana/ Jumlah seluruh kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi yang direncanakan x 100% | | % PD yang mengirimkan laporan IKM | persentase yang menunjukkan jumlah PD yang mengirimkan laporan IKM tahun ke n dibandingkan dengan jumlah seluruh PD | (Jumlah PD yang mengirimkan laporan IKM/ jumlah seluruh PD) x 100% | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | dokumen peningkatan kinerja dan RB (pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Peningkatan kinerja dan RB) yang tersusun sesuai dengan timeline kegiatan tahun ke-n | Total dokumen peningkatan kinerja dan RB yang tersusun |
| | Persentase PD dengan Nilai IKM minimal diatas 85 | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di atas 85 | (Jumlah PD dengan nilai IKM PD diatas 85 pada tahun n /Jumlah semua PD yang melakukan IKM pada tahun n) X 100% | | | | | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | berpedoman pada PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, PermenPANRB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan dan regulasi ketata laksanaan yang berlaku. | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sesuai dengan timeline kegiatan tahun ke-n | Total dokumen Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA | Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana | Presentase kebijakan bidang pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian yang terlaksana | (Kebijakan dibidang pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana / Jumlah Kebijakan dibidang pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi) dikali 100% | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase kebijakan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Yang Terlaksana | Presentase jumlah kebijakan mengenai fasilitasi kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai dengan kegiatan KDH, WKDH dan sekretaris daerah | Kebijakan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Ditindaklanjuti / Jumlah Kebijakan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan x 100% | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Fasilitasi keprotokolan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tata cara atau aturan resmi yang mengatur penyelenggaraan acara kenegaraan/pemerintahan, termasuk pengaturan tempat duduk, tata urutan penyampaian sambutan, dan penyambutan tamu negara/pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku | Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi |
| | | | | | | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Fasilitasi komunikasi pimpinan adalah kegiatan penyediaan sarana, prasarana, dan dukungan teknis untuk memperlancar komunikasi antara pimpinan daerah dengan pihak internal dan eksternal, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media komunikasi) | Jumlah kegiatan komunikasi pimpinan yang difasilitasi |
| | | | | | | | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Pendokumentasian tugas pimpinan adalah kegiatan pencatatan, pengumpulan, pengelompokan, dan penyimpanan seluruh data dan informasi terkait pelaksanaan tugas pimpinan daerah, termasuk dokumentasi kegiatan, keputusan, dan kebijakan | Jumlah laporan tugas pimpinan yang tersimpan |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana | Persentase jumlah kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang telah diimplementasikan sesuai dengan rencana dan target waktu yang ditetapkan, dibandingkan dengan jumlah total kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan untuk kurun waktu tertentu. | Kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat yang terlaksana / Total Kebijakan yang ditetapkan x 100% | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana | Persentase jumlah kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang terkait dengan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, dll. yang telah ditindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan program, kegiatan, atau rencana kerja nyata, dibandingkan dengan jumlah total kebijakan yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu | Persentase Kebijakan Ditindaklanjuti = Jumlah Kebijakan yang Ditindaklanjuti / Jumlah Total Kebijakan yang Ditetapkan x 100% | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Dokumen yang dihasilkan sebagai output dari kegiatan fasilitasi dalam pengelolaan bina mental spiritual dalam periode waktu tertentu. Dokumen ini dapat berupa surat keputusan, laporan kegiatan, pedoman, modul, materi pembinaan, atau dokumen pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program bina mental spiritual | Jumlah Dokumen =Jumlah Surat keputusan+ Laporan Kegiatan+Jumlah Pedoman+Jumlah Modul+Jumlah Materi Pembinaan+Jumlah Dokumen Pendukung Lainnya<br><br>Keterangan:<br>Jumlah Dokumen = total seluruh dokumen output yang dihasilkan.<br><br>. |
| | | | | | | | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Dokumen yang dihasilkan sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, serta pelaporan capaian kinerja program atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dalam periode waktu tertentu. Dokumen dapat berupa keputusan kebijakan, laporan evaluasi, laporan kinerja, kajian, maupun dokumen strategis lainnya yang relevan. | Jumlah Dokumen = (Jumlah Keputusan Kebijakan)+(Jumlah Laporan Evaluasi)+(Jumlah Laporan Kinerja)+(Jumlah Kajian)+(Jumlah Dokumen Strategis Lainnya) |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Jumlah dokumen yang dihasilkan sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja program atau kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen dapat berupa keputusan kebijakan, laporan evaluasi, laporan kinerja, kajian, maupun dokumen strategis lainnya yang relevan. | Jumlah Dokumen = (Dokumen Kebijakan)+(Dokumen Evaluasi)+(Dokumen Capaian Kinerja) |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana | Prosentase kebijakan dibidang hukum yang terlaksana adalah perbandingan antara jumlah kebijakan yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah keseluruhan kebijakan yang direncanakan dalam satu tahun/periode tertentu di bidang:<br>1. Perundang-undangan (misalnya: penyusunan/perubahan peraturan daerah, naskah akademik, peraturan bupati, keputusan bupati),<br>2. Bantuan hukum (misalnya: memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, mediasi hukum),<br>3. Dokumentasi dan informasi hukum (misalnya: pengelolaan JDIH, diseminasi informasi hukum),<br>yang dinyatakan dalam bentuk persen (%). | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana | | FKHT : Fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana<br>KHHR : Fasilitasi dan koordinasi hukum yang direncanakan | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah yang ditetapkan | Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah yang ditetapkan dalam 1 tahun |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KT : Kebijakan yang terlaksana<br>KR : Kebijakan yang direncanakan<br>$\%KT = \frac{\Sigma\, KT}{\Sigma\, KR}\, x\, 100\%$ | | | Prosentase fasilitasi dan hukum yang terlaksana a ukuran yang menunjukk mana kegiatan fasilitasi koordinasi hukum yang t direncanakan pada suat dapat direalisasikan atau dilaksanakan, dinyatakar bentuk persentase. | | | | | |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Persentase implementasi Renaksi Peningkatan IRH | Persentase Implementasi Renaksi Peningkatan Indeks Reformasi Hukum adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan atau aksi yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Aksi (Renaksi) Reformasi Hukum telah direalisasikan pada periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. | I : Implementasi R<br>R : Rencana Aksi IRH<br>$\% I = \frac{I}{R} x 100\%$ | | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah permasalahan hukum Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang penyelesaiannya mendapatkan fasilitas, baik secara litigasi maupun non litigasi | Banyaknya Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dalam 1 tahun |
| | | | | | | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah yang didokumentasi dan diarsipkan | Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah yang didokumentasi dan diarsipkan dalam 1 tahun |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi Kewilayahan dan otonomi serta Kerjasama daerah yang terlaksan | Tingkat realisasi kebijakan yang terlaksana dibandingkan dengan seluruh kebijakan yang direncanakan dalam bidang pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah | (Jumlah kebijakan yang terlaksana x 100%) /<br>Jumlah kebijakan yang direncanakan | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun dengan baik, berkualitas, dan tepat waktu yang terdiri dari LPPD, ringkasan LPPD, Laporan Penerapan SPM, LKPJ | Realisasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun / target laporan yang disusun x 100% | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah | dokumen laporan pemerintahan daerah, administrasi kepala daerah, administrasi DPRD, kinerja kecamatan |
| | | | | | | | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Adminstrasi Kewilayahan | Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kewilayahan | jumlah dokumen batas daerah, data kewilayahan, rupabumi |
| | | | | Fasilitasi kerjasama Daerah | Persentase peningkatan kerja sama daerah terkait pelayanan publik | Penyelenggaraan kerja sama pelayanan publik yang disepakati | Jumlah kerja sama yang disepakati / Jumlah kerja sama yang direncanakan x 100% | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah dokumen penyelenggaraan kerja sama daerah tentang pelayanan publik | jumlah dokumen kerja sama antar daerah, kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan kerja sama sinergi |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi serta pelaporan yang terlaksana | Program mengelola dan mengintegrasikan perumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program perekonomian dan pembangunan daerah | (Kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi serta pelaporan yang terlaksana/yang tersusun) dikali 100% | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase kegiatan administrasi pembangunan yang terlaksana tepat waktu | Kegiatan administrasi pembangunan yang terlaksana tepat waktu sesuai rencana kinerja tahunan | (Kegiatan penyusunan, pengendalian dan evaluasi program yang terlaksana tepat waktu/Kegiatan penyusunan, pengendalian dan evaluasi program yang terlaksana) dikali 100% | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Banyaknya dokumen yang dihasilkan sebagai hasil kegiatan fasilitasi dalam proses penyusunan program pembangunan daerah | Jumlah dokumen = dokumen hasil fasilitasi |
| | | | | | | | | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Total laporan yang disusun berdasarkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan | Jumlah laporan = laporan hasil pengendalian |
| | | | | | | | | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah laporan hasil dari kegiatan pengelolaan evaluasi pelaporan pelaksanaan program pembangunan yang disusun | Jumlah laporan = laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian, dan sumber daya alam yang terlaksana | perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan target yang ditetapkan (outcome) | Jumlah kebijakan yang terlaksana / Jumlah kebijakan yang direncanakan x 100% | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Ditindaklanjuti | pembagian antara kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklajuti dengan kebijakan perekonomian yang ada | (Jumlah kebijakan dibidang perekonomian yang ditindaklanjuti/jumlah Kebijakan bidang perekonomian ditahun (n)) x 100% | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keselarasan kebijakan, efektivitas pelaksanaan dalam kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | (Jumlah kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang ditinjaklanjuti/jumlah Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang disusun) x 100% |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) | Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10 | $IKAD_m = \left( \sum_{i=1}^{14} a_i \bar{q}_{im} \right) \times 10$ $a_i$ Di mana merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Kegiatan mengatur, mengawasi, dan menyalurkan sumber daya ekonomi secara efisien dan merata guna menjaga stabilitas ekonomi daerah, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, serta memastikan keterjangkauan dan keadilan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. | (Jumlah kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang ditinjaklanjuti/jumlah Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang disusun) x 100% |
| | | | | | | | | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. | (Jumlah kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil yang ditinjaklanjuti/jumlah Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil yang disusun) x 100% |
| | | | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang ditindaklanjuti | Pembagian antara kebijakan sumber daya alam yang ditindaklajuti dengan kebijakan sumber daya alam yang ada | (Jumlah kebijakan dibidang sumber daya alam yang ditindaklanjuti/jumlah Kebijakan bidang sumber daya alam ditahun (n)) x 100% | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keselarasan kebijakan, efektivitas pelaksanaan dalam kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | (Jumlah kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang ditinjaklanjuti/jumlah Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang disusun) x 100% |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keselarasan kebijakan, efektivitas pelaksanaan dalam kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | (Jumlah kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang ditinjaklanjuti/jumlah Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang disusun) x 100% |
| | | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keselarasan kebijakan, efektivitas pelaksanaan dalam kebijakan Energi dan Air | (Jumlah kebijakan Energi dan Air yang ditinjaklanjuti/jumlah Kebijakan Energi dan Air yang disusun) x 100% |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana | Kebijakan pengadaan barang dan jasa adalah aturan turunan, bisa sebagai petunjuk teknis pengelolaan PBJ berupa Perbup/SK Bupati/Instruksi Bupati/SE | (Kebijakan di bidang pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, pembinaan dan advokasi PBJ yang terlaksana / target kebijakan yang disusun) x 100% | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana | Prosentase kualitas layanan pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari pemenuhan dokumen pengadaan pbj, pengelolaan lpse serta pembinaan dan advokasi pbj | (Jumlah pengajuan pengadaan barang/jasa yang terealisasi dibagi dengan jumlah pengadaan barang dan jasa)x100% | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen hasil pengelolaan pengadaan PBJ adalah dokumen/laporan tribulan rekapitulasi perencanaan pengadaan dan pemilihan penyedia | Jumlah Dokumen / Laporan Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuat tiap tribulan |
| | | | | | | | | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Dokumen hasil LPSE adalah dokumen tribulan jumlah pengguna yang terfasilitasi layanan registrasi dan verifikasi, jumlah pengguna yang terfasilitasi permasalahan SPSE | Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dibuat tiap tribulan |

| PROGRAM | Indikator Program | Definisi Operasional Indikator Program | Formula Perhitungan Indikator Program | KEGIATAN | Indikator Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Kegiatan | SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Sub Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Prosentse orang yang terfasilitasi untuk mengikuti bimbingan teknis | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi PBJ / target orang yang dibina dan diadvokasi |

**Tabel 4.3**
Program , Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | 51.325.736.811,14 | | 51.896.100.000,00 | | 52.669.500.000,00 | | 53.744.200.000,00 | | 55.004.300.000,00 | | |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 30.023.491.811,14 | | 30.357.100.000,00 | | 30.809.500.000,00 | | 31.438.100.000,00 | | 32.175.200.000,00 | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD | Persentase PD dengan Nilai Pelaporan Kinerja minimal 11 Pada LHE AKIP PD | 100 | 100 | 700.000.000,00 | 100 | 707.778.100,00 | 100 | 718.325.840,00 | 100 | 732.981.697,00 | 100 | 750.167.240,00 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah | |
| 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | | | | 700.000.000,00 | | 707.778.100,00 | | 718.325.840,00 | | 732.981.697,00 | | 750.167.240,00 | | |
| Peningkatan perangkat daerah dengan tingkat kematangan minimal sedang, Peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan prima, Peningkatan kualitas pelaporan akuntabilitas perangkat daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 13 | 12 | 700.000.000,00 | 12 | 707.778.100,00 | 12 | 718.325.840,00 | 12 | 732.981.697,00 | 12 | 750.167.240,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 260 | 260 | | 260 | | 260 | | 260 | | 260 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 72 | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| 4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | 220.000.000,00 | | 222.978.100,00 | | 225.422.000,00 | | 229.237.217,00 | | 233.432.882,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 5 | 5 | 220.000.000,00 | 5 | 222.978.100,00 | 5 | 225.422.000,00 | 5 | 229.237.217,00 | 5 | 233.432.882,00 | | |
| 4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 200.000.000,00 | | 202.000.000,00 | | 205.020.000,00 | | 208.360.200,00 | | 212.620.802,00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 72 | 48 | 200.000.000,00 | 48 | 202.000.000,00 | 48 | 205.020.000,00 | 48 | 208.360.200,00 | 48 | 212.620.802,00 | | |
| 4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | 200.000.000,00 | | 202.000.000,00 | | 205.020.000,00 | | 208.360.200,00 | | 212.620.802,00 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 20 | 20 | 200.000.000,00 | 20 | 202.000.000,00 | 20 | 205.020.000,00 | 20 | 208.360.200,00 | 20 | 212.620.802,00 | | |
| 4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 40.000.000,00 | | 40.400.000,00 | | 41.304.000,00 | | 43.512.040,00 | | 45.724.160,00 | | |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 13 | 12 | 40.000.000,00 | 12 | 40.400.000,00 | 12 | 41.304.000,00 | 12 | 43.512.040,00 | 12 | 45.724.160,00 | | |
| 4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 40.000.000,00 | | 40.400.000,00 | | 41.559.840,00 | | 43.512.040,00 | | 45.768.594,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 260 | 260 | 40.000.000,00 | 260 | 40.400.000,00 | 260 | 41.559.840,00 | 260 | 43.512.040,00 | 260 | 45.768.594,00 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD | 73,16 | 73,50 | 140.000.000,00 | 73,75 | 141.555.620,00 | 74,00 | 143.665.169,00 | 74,25 | 146.596.340,00 | 74,50 | 150.033.449,00 | | |
| 4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 140.000.000,00 | | 141.555.620,00 | | 143.665.169,00 | | 146.596.340,00 | | 150.033.449,00 | | |
| Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13 | 6 | 140.000.000,00 | 6 | 141.555.620,00 | 6 | 143.665.169,00 | 6 | 146.596.340,00 | 6 | 150.033.449,00 | | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | | | | 100.000.000,00 | | 101.155.620,00 | | 102.861.169,00 | | 105.384.300,00 | | 108.409.289,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13 | 6 | 100.000.000,00 | 6 | 101.155.620,00 | 6 | 102.861.169,00 | 6 | 105.384.300,00 | 6 | 108.409.289,00 | | |
| 4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 40.000.000,00 | | 40.400.000,00 | | 40.804.000,00 | | 41.212.040,00 | | 41.624.160,00 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 12 | 40.000.000,00 | 12 | 40.400.000,00 | 12 | 40.804.000,00 | 12 | 41.212.040,00 | 12 | 41.624.160,00 | | |
| Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Prokopim | Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana | 90,00 | 92,00 | 700.000.000,00 | 92,00 | 707.778.100,00 | 92,00 | 718.325.840,00 | 92,00 | 732.981.697,00 | 92,00 | 750.167.240,00 | | |
| 4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | 700.000.000,00 | | 707.778.100,00 | | 718.325.840,00 | | 732.981.697,00 | | 750.167.240,00 | | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan kepada KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 12 | 12 | 700.000.000,00 | 12 | 707.778.100,00 | 12 | 718.325.840,00 | 12 | 732.981.697,00 | 12 | 750.167.240,00 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan | | | | 375.000.000,00 | | 379.128.100,00 | | 383.993.340,00 | | 390.133.872,00 | | 397.970.936,00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 12 | 12 | 375.000.000,00 | 12 | 379.128.100,00 | 12 | 383.993.340,00 | 12 | 390.133.872,00 | 12 | 397.970.936,00 | | |
| 4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 125.000.000,00 | | 126.450.000,00 | | 128.912.500,00 | | 133.287.625,00 | | 137.075.502,00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 | 12 | 125.000.000,00 | 12 | 126.450.000,00 | 12 | 128.912.500,00 | 12 | 133.287.625,00 | 12 | 137.075.502,00 | | |
| 4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | 200.000.000,00 | | 202.200.000,00 | | 205.420.000,00 | | 209.560.200,00 | | 215.120.802,00 | | |
| Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 12 | 12 | 200.000.000,00 | 12 | 202.200.000,00 | 12 | 205.420.000,00 | 12 | 209.560.200,00 | 12 | 215.120.802,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dna Pelaporan Bid Umum | Persentase Kebijakan di bidang TU pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, RT dan perlengkapan yang dilaksanakan | 90,00 | 92,25 | 28.483.491.811,14 | 92,50 | 28.799.988.180,00 | 92,75 | 29.229.183.151,00 | 93,00 | 29.825.540.266,00 | 93,25 | 30.524.832.071,00 | | |
| 4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 19.358.751.943,14 | | 19.576.310.425,00 | | 19.865.735.644,00 | | 20.263.874.009,00 | | 20.746.514.868,00 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun Benar dan Tepat Waktu | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | 1 | 19.358.751.943,14 | 1 | 19.576.310.425,00 | 1 | 19.865.735.644,00 | 1 | 20.263.874.009,00 | 1 | 20.746.514.868,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 127 | 135 | | 140 | | 145 | | 150 | | 155 | | | |
| 4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 19.238.751.943,14 | | 19.454.977.038,00 | | 19.742.594.073,00 | | 20.138.220.006,00 | | 20.617.914.772,00 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 127 | 135 | 19.238.751.943,14 | 140 | 19.454.977.038,00 | 145 | 19.742.594.073,00 | 150 | 20.138.220.006,00 | 155 | 20.617.914.772,00 | | |
| 4.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 45.000.000,00 | | 45.500.020,00 | | 46.178.089,00 | | 47.120.251,00 | | 48.225.036,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 | 12 | 45.000.000,00 | 12 | 45.500.020,00 | 12 | 46.178.089,00 | 12 | 47.120.251,00 | 12 | 48.225.036,00 | | |
| 4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan | | | | 30.000.000,00 | | 30.333.347,00 | | 30.785.393,00 | | 31.413.501,00 | | 32.150.024,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.333.347,00 | 1 | 30.785.393,00 | 1 | 31.413.501,00 | 1 | 32.150.024,00 | | |
| 4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 25.000.000,00 | | 25.277.789,00 | | 25.654.494,00 | | 26.177.917,00 | | 26.791.687,00 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | 18 | 25.000.000,00 | 18 | 25.277.789,00 | 18 | 25.654.494,00 | 18 | 26.177.917,00 | 18 | 26.791.687,00 | | |
| 4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 20.000.000,00 | | 20.222.231,00 | | 20.523.595,00 | | 20.942.334,00 | | 21.433.349,00 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 | 2 | 20.000.000,00 | 2 | 20.222.231,00 | 2 | 20.523.595,00 | 2 | 20.942.334,00 | 2 | 21.433.349,00 | | |
| 4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 30.000.000,00 | | 30.333.345,00 | | 30.785.391,00 | | 31.413.501,00 | | 32.150.022,00 | | |
| Tersediannya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Benar | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | 2 | 30.000.000,00 | 2 | 30.333.345,00 | 2 | 30.785.391,00 | 2 | 31.413.501,00 | 2 | 32.150.022,00 | | |
| | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000,00 | | 10.111.115,00 | | 10.261.797,00 | | 10.471.167,00 | | 10.716.674,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | 2 | 10.000.000,00 | 2 | 10.111.115,00 | 2 | 10.261.797,00 | 2 | 10.471.167,00 | 2 | 10.716.674,00 | | |
| 4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 10.000.000,00 | | 10.111.115,00 | | 10.261.797,00 | | 10.471.167,00 | | 10.716.674,00 | | |
| Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.111.115,00 | 4 | 10.261.797,00 | 4 | 10.471.167,00 | 4 | 10.716.674,00 | | |
| 4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 10.000.000,00 | | 10.111.115,00 | | 10.261.797,00 | | 10.471.167,00 | | 10.716.674,00 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 12 | 10.000.000,00 | 12 | 10.111.115,00 | 12 | 10.261.797,00 | 12 | 10.471.167,00 | 12 | 10.716.674,00 | | |
| 4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 30.000.000,00 | | 30.333.345,00 | | 30.785.391,00 | | 31.413.501,00 | | 32.150.022,00 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 40 | 30.000.000,00 | 40 | 30.333.345,00 | 40 | 30.785.391,00 | 40 | 31.413.501,00 | 40 | 32.150.022,00 | | |
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 4.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 10.000.000,00 | | 10.111.115,00 | | 10.261.797,00 | | 10.471.167,00 | | 10.716.674,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0 | 2 | 10.000.000,00 | 2 | 10.111.115,00 | 2 | 10.261.797,00 | 2 | 10.471.167,00 | 2 | 10.716.674,00 | | |
| 4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 10.000.000,00 | | 10.111.115,00 | | 10.261.797,00 | | 10.471.167,00 | | 10.716.674,00 | | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 2 | 10.000.000,00 | 2 | 10.111.115,00 | 2 | 10.261.797,00 | 2 | 10.471.167,00 | 2 | 10.716.674,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 10.000.000,00 | | 10.111.115,00 | | 10.261.797,00 | | 10.471.167,00 | | 10.716.674,00 | | |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 40 | 10.000.000,00 | 40 | 10.111.115,00 | 40 | 10.261.797,00 | 40 | 10.471.167,00 | 40 | 10.716.674,00 | | |
| 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 455.000.000,00 | | 460.055.762,00 | | 466.911.793,00 | | 476.438.101,00 | | 487.608.702,00 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Umum PD yang terlaksana | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 | 13 | 455.000.000,00 | 13 | 460.055.762,00 | 13 | 466.911.793,00 | 13 | 476.438.101,00 | 13 | 487.608.702,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 30.000.000,00 | | 30.333.347,00 | | 30.785.393,00 | | 31.413.501,00 | | 32.150.024,00 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 | 13 | 30.000.000,00 | 13 | 30.333.347,00 | 13 | 30.785.393,00 | 13 | 31.413.501,00 | 13 | 32.150.024,00 | | |
| 4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000,00 | | 30.333.347,00 | | 30.785.393,00 | | 31.413.501,00 | | 32.150.024,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 | 12 | 30.000.000,00 | 12 | 30.333.347,00 | 12 | 30.785.393,00 | 12 | 31.413.501,00 | 12 | 32.150.024,00 | | |
| 4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000,00 | | 10.111.115,00 | | 10.261.797,00 | | 10.471.167,00 | | 10.716.674,00 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 | 12 | 10.000.000,00 | 12 | 10.111.115,00 | 12 | 10.261.797,00 | 12 | 10.471.167,00 | 12 | 10.716.674,00 | | |
| 4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 10.000.000,00 | | 10.111.115,00 | | 10.261.797,00 | | 10.471.167,00 | | 10.716.674,00 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 | 12 | 10.000.000,00 | 12 | 10.111.115,00 | 12 | 10.261.797,00 | 12 | 10.471.167,00 | 12 | 10.716.674,00 | | |
| 4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 50.000.000,00 | | 50.555.578,00 | | 51.308.988,00 | | 52.355.835,00 | | 53.583.374,00 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 | 12 | 50.000.000,00 | 12 | 50.555.578,00 | 12 | 51.308.988,00 | 12 | 52.355.835,00 | 12 | 53.583.374,00 | | |
| 4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100.000.000,00 | | 101.111.157,00 | | 102.617.977,00 | | 104.711.671,00 | | 107.166.748,00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 | 12 | 100.000.000,00 | 12 | 101.111.157,00 | 12 | 102.617.977,00 | 12 | 104.711.671,00 | 12 | 107.166.748,00 | | |
| 4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 200.000.000,00 | | 202.222.314,00 | | 205.235.954,00 | | 209.423.342,00 | | 214.333.497,00 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 12 | 200.000.000,00 | 12 | 202.222.314,00 | 12 | 205.235.954,00 | 12 | 209.423.342,00 | 12 | 214.333.497,00 | | |
| 4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 25.000.000,00 | | 25.277.789,00 | | 25.654.494,00 | | 26.177.917,00 | | 26.791.687,00 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.277.789,00 | 1 | 25.654.494,00 | 1 | 26.177.917,00 | 1 | 26.791.687,00 | | |
| 4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 240.000.000,00 | | 242.666.776,00 | | 246.283.144,00 | | 251.308.009,00 | | 257.200.194,00 | | |
| Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaranTugas dan Fungsi PD yang diadakan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 | 1 | 240.000.000,00 | 1 | 242.666.776,00 | 1 | 246.283.144,00 | 1 | 251.308.009,00 | 1 | 257.200.194,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 14 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 23 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 100.000.000,00 | | 101.111.157,00 | | 102.617.977,00 | | 104.711.671,00 | | 107.166.748,00 | | |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 101.111.157,00 | 1 | 102.617.977,00 | 1 | 104.711.671,00 | 1 | 107.166.748,00 | | |
| 4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 50.000.000,00 | | 50.555.578,00 | | 51.308.988,00 | | 52.355.835,00 | | 53.583.374,00 | | |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.555.578,00 | 1 | 51.308.988,00 | 1 | 52.355.835,00 | 1 | 53.583.374,00 | | |
| 4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 30.000.000,00 | | 30.333.347,00 | | 30.785.393,00 | | 31.413.501,00 | | 32.150.024,00 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 23 | 3 | 30.000.000,00 | 3 | 30.333.347,00 | 3 | 30.785.393,00 | 3 | 31.413.501,00 | 3 | 32.150.024,00 | | |
| 4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 30.000.000,00 | | 30.333.347,00 | | 30.785.393,00 | | 31.413.501,00 | | 32.150.024,00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 14 | 3 | 30.000.000,00 | 3 | 30.333.347,00 | 3 | 30.785.393,00 | 3 | 31.413.501,00 | 3 | 32.150.024,00 | | |
| 4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000,00 | | 30.333.347,00 | | 30.785.393,00 | | 31.413.501,00 | | 32.150.024,00 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 3 | 30.000.000,00 | 3 | 30.333.347,00 | 3 | 30.785.393,00 | 3 | 31.413.501,00 | 3 | 32.150.024,00 | | |
| 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 5.229.364.251,00 | | 5.287.470.706,00 | | 5.366.267.816,00 | | 5.475.754.694,00 | | 5.604.139.640,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| Terselenggaranya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang terlaksana | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 5.229.364.251,00 | 12 | 5.287.470.706,00 | 12 | 5.366.267.816,00 | 12 | 5.475.754.694,00 | 12 | 5.604.139.640,00 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000,00 | | 5.055.557,00 | | 5.130.898,00 | | 5.235.583,00 | | 5.358.337,00 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 5.000.000,00 | 12 | 5.055.557,00 | 12 | 5.130.898,00 | 12 | 5.235.583,00 | 12 | 5.358.337,00 | | |
| 4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 2.532.000.000,00 | | 2.560.134.500,00 | | 2.598.287.184,00 | | 2.651.299.512,00 | | 2.713.462.075,00 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 2.532.000.000,00 | 12 | 2.560.134.500,00 | 12 | 2.598.287.184,00 | 12 | 2.651.299.512,00 | 12 | 2.713.462.075,00 | | |
| 4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000,00 | | 30.333.347,00 | | 30.785.393,00 | | 31.413.501,00 | | 32.150.024,00 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 30.000.000,00 | 12 | 30.333.347,00 | 12 | 30.785.393,00 | 12 | 31.413.501,00 | 12 | 32.150.024,00 | | |
| 4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.662.364.251,00 | | 2.691.947.302,00 | | 2.732.064.341,00 | | 2.787.806.098,00 | | 2.853.169.204,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 2.662.364.251,00 | 12 | 2.691.947.302,00 | 12 | 2.732.064.341,00 | 12 | 2.787.806.098,00 | 12 | 2.853.169.204,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1.695.143.617,00 | | 1.711.527.025,00 | | 1.739.346.130,00 | | 1.782.011.874,00 | | 1.816.260.482,00 | | |
| Terselenggaranya Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 32 | 30 | 1.695.143.617,00 | 30 | 1.711.527.025,00 | 30 | 1.739.346.130,00 | 31 | 1.782.011.874,00 | 32 | 1.816.260.482,00 | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 87 | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 22 | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 105 | 276 | | 276 | | 276 | | 276 | | 276 | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 615.143.617,00 | | 619.526.530,00 | | 631.071.977,00 | | 651.125.828,00 | | 658.859.599,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 22 | 22 | 615.143.617,00 | 22 | 619.526.530,00 | 22 | 631.071.977,00 | 22 | 651.125.828,00 | 22 | 658.859.599,00 | | |
| 4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 400.000.000,00 | | 404.444.628,00 | | 410.471.909,00 | | 418.846.684,00 | | 428.666.994,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 87 | 87 | 400.000.000,00 | 87 | 404.444.628,00 | 87 | 410.471.909,00 | 87 | 418.846.684,00 | 87 | 428.666.994,00 | | |
| 4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 30.000.000,00 | | 30.333.347,00 | | 30.785.393,00 | | 31.413.501,00 | | 32.150.024,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 32 | 30 | 30.000.000,00 | 30 | 30.333.347,00 | 30 | 30.785.393,00 | 31 | 31.413.501,00 | 32 | 32.150.024,00 | | |
| 4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 500.000.000,00 | | 505.555.785,00 | | 513.089.886,00 | | 523.558.355,00 | | 535.833.743,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 105 | 276 | 500.000.000,00 | 276 | 505.555.785,00 | 276 | 513.089.886,00 | 276 | 523.558.355,00 | 276 | 535.833.743,00 | | |
| 4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000,00 | | 101.111.157,00 | | 102.617.977,00 | | 104.711.671,00 | | 107.166.748,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 101.111.157,00 | 1 | 102.617.977,00 | 1 | 104.711.671,00 | 1 | 107.166.748,00 | | |
| 4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000,00 | | 50.555.578,00 | | 51.308.988,00 | | 52.355.835,00 | | 53.583.374,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.555.578,00 | 5 | 51.308.988,00 | 5 | 52.355.835,00 | 5 | 53.583.374,00 | | |
| 4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 900.232.000,00 | | 910.234.991,00 | | 923.799.867,00 | | 942.647.970,00 | | 964.749.362,00 | | |
| Fasilitasi administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 | 2 | 900.232.000,00 | 2 | 910.234.991,00 | 2 | 923.799.867,00 | 2 | 942.647.970,00 | 2 | 964.749.362,00 | | |
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 6 | 48 | | 49 | | 50 | | 54 | | 57 | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan | 2 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| | Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 180.232.000,00 | | 182.234.660,00 | | 184.950.432,00 | | 188.723.939,00 | | 193.148.774,00 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 | 2 | 180.232.000,00 | 2 | 182.234.660,00 | 2 | 184.950.432,00 | 2 | 188.723.939,00 | 2 | 193.148.774,00 | | |
| 4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 100.000.000,00 | | 101.111.157,00 | | 102.617.977,00 | | 104.711.671,00 | | 107.166.748,00 | | |
| Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 6 | 48 | 100.000.000,00 | 49 | 101.111.157,00 | 50 | 102.617.977,00 | 54 | 104.711.671,00 | 57 | 107.166.748,00 | | |
| 4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 20.000.000,00 | | 20.222.231,00 | | 20.523.595,00 | | 20.942.334,00 | | 21.433.349,00 | | |
| Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 | 4 | 20.000.000,00 | 4 | 20.222.231,00 | 4 | 20.523.595,00 | 4 | 20.942.334,00 | 4 | 21.433.349,00 | | |
| 4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 600.000.000,00 | | 606.666.943,00 | | 615.707.863,00 | | 628.270.026,00 | | 643.000.491,00 | | |
| Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 | 2 | 600.000.000,00 | 2 | 606.666.943,00 | 2 | 615.707.863,00 | 2 | 628.270.026,00 | 2 | 643.000.491,00 | | |
| 4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | 545.000.000,00 | | 551.055.805,00 | | 559.267.975,00 | | 570.678.607,00 | | 584.058.779,00 | | |
| Fasilitasi kebutuhan kerumahtanggan KDH,WDH, dan Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 12 | 12 | 545.000.000,00 | 12 | 551.055.805,00 | 12 | 559.267.975,00 | 12 | 570.678.607,00 | 12 | 584.058.779,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | 200.000.000,00 | | 202.222.314,00 | | 205.235.954,00 | | 209.423.342,00 | | 214.333.497,00 | | |
| Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 | 12 | 200.000.000,00 | 12 | 202.222.314,00 | 12 | 205.235.954,00 | 12 | 209.423.342,00 | 12 | 214.333.497,00 | | |
| 4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | 200.000.000,00 | | 202.222.314,00 | | 205.235.954,00 | | 209.423.342,00 | | 214.333.497,00 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 | 12 | 200.000.000,00 | 12 | 202.222.314,00 | 12 | 205.235.954,00 | 12 | 209.423.342,00 | 12 | 214.333.497,00 | | |
| 4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | 145.000.000,00 | | 146.611.177,00 | | 148.796.067,00 | | 151.831.923,00 | | 155.391.785,00 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 12 | 12 | 145.000.000,00 | 12 | 146.611.177,00 | 12 | 148.796.067,00 | 12 | 151.831.923,00 | 12 | 155.391.785,00 | | |
| 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 19.242.245.000,00 | | 19.456.100.000,00 | | 19.746.000.000,00 | | 20.148.900.000,00 | | 20.621.300.000,00 | | |
| Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesra | Persentase kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana | 90,00 | 93,00 | 17.892.245.000,00 | 94,00 | 18.091.096.331,00 | 95,00 | 18.360.657.490,00 | 96,00 | 18.735.290.777,00 | 97,00 | 19.174.548.075,00 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah | |
| 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | 17.892.245.000,00 | | 18.091.096.331,00 | | 18.360.657.490,00 | | 18.735.290.777,00 | | 19.174.548.075,00 | | |
| Meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 4 | 13 | 17.892.245.000,00 | 13 | 18.091.096.331,00 | 13 | 18.360.657.490,00 | 13 | 18.735.290.777,00 | 13 | 19.174.548.075,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | 3.142.440.200,00 | | 3.179.864.602,00 | | 3.241.603.248,00 | | 3.337.659.280,00 | | 3.455.035.873,00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 4 | 13 | 3.142.440.200,00 | 13 | 3.179.864.602,00 | 13 | 3.241.603.248,00 | 13 | 3.337.659.280,00 | 13 | 3.455.035.873,00 | | |
| 4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | 713.114.000,00 | | 727.174.021,00 | | 763.447.592,00 | | 834.722.067,00 | | 927.069.287,00 | | |
| Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, | 4 | 4 | 713.114.000,00 | 4 | 727.174.021,00 | 4 | 763.447.592,00 | 4 | 834.722.067,00 | 4 | 927.069.287,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| dan KB | Pengendalian Penduduk dan KB | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | 14.036.690.800,00 | | 14.184.057.708,00 | | 14.355.606.650,00 | | 14.562.909.430,00 | | 14.792.442.915,00 | | |
| Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 5 | 5 | 14.036.690.800,00 | 5 | 14.184.057.708,00 | 5 | 14.355.606.650,00 | 5 | 14.562.909.430,00 | 5 | 14.792.442.915,00 | | |
| Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan | Persentase kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi Kewilayahan dan otonomi serta Kerjasama daerah yang terlaksana | 98,06 | 93,00 | 600.000.000,00 | 94,00 | 606.668.299,00 | 95,00 | 615.707.782,00 | 96,00 | 628.270.765,00 | 97,00 | 643.000.855,00 | | |
| 4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan | | | | 490.000.000,00 | | 495.568.299,00 | | 502.496.782,00 | | 511.937.655,00 | | 522.534.414,00 | | |
| Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 8 | 8 | 490.000.000,00 | 8 | 495.568.299,00 | 8 | 502.496.782,00 | 8 | 511.937.655,00 | 8 | 522.534.414,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | 390.000.000,00 | | 394.568.299,00 | | 399.486.782,00 | | 405.907.555,00 | | 412.474.013,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 8 | 8 | 390.000.000,00 | 8 | 394.568.299,00 | 8 | 399.486.782,00 | 8 | 405.907.555,00 | 8 | 412.474.013,00 | | |
| 4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | 100.000.000,00 | | 101.000.000,00 | | 103.010.000,00 | | 106.030.100,00 | | 110.060.401,00 | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 3 | 3 | 100.000.000,00 | 3 | 101.000.000,00 | 3 | 103.010.000,00 | 3 | 106.030.100,00 | 3 | 110.060.401,00 | | |
| 4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah | | | | 110.000.000,00 | | 111.100.000,00 | | 113.211.000,00 | | 116.333.110,00 | | 120.466.441,00 | | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kerja sama tentang pelayanan publik | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 17 | 25 | 110.000.000,00 | 30 | 111.100.000,00 | 35 | 113.211.000,00 | 40 | 116.333.110,00 | 45 | 120.466.441,00 | | |
| 4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | 110.000.000,00 | | 111.100.000,00 | | 113.211.000,00 | | 116.333.110,00 | | 120.466.441,00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 17 | 25 | 110.000.000,00 | 30 | 111.100.000,00 | 35 | 113.211.000,00 | 40 | 116.333.110,00 | 45 | 120.466.441,00 | | |
| Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dna Pelaporan Bidang Hukum | Persentase implementasi Renaksi Peningkatan IRH | 87,32 | 90,00 | 750.000.000,00 | 90,00 | 758.335.370,00 | 90,00 | 769.634.728,00 | 90,00 | 785.338.458,00 | 90,00 | 803.751.070,00 | | |
| | Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana | 99,74 | 93,00 | | 94,00 | | 95,00 | | 96,00 | | 97,00 | | | |
| 4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | | 750.000.000,00 | | 758.335.370,00 | | 769.634.728,00 | | 785.338.458,00 | | 803.751.070,00 | | |
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 4 | 4 | 750.000.000,00 | 4 | 758.335.370,00 | 4 | 769.634.728,00 | 4 | 785.338.458,00 | 4 | 803.751.070,00 | | |
| | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 1200 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | | |
| | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 1200 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | | |
| 4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | 350.000.000,00 | | 354.335.370,00 | | 359.035.000,00 | | 365.218.058,00 | | 372.211.404,00 | | |
| Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 1200 | 500 | 350.000.000,00 | 500 | 354.335.370,00 | 500 | 359.035.000,00 | 500 | 365.218.058,00 | 500 | 372.211.404,00 | | |
| 4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | 275.000.000,00 | | 277.750.000,00 | | 282.527.500,00 | | 287.332.775,00 | | 294.166.103,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 4 | 4 | 275.000.000,00 | 4 | 277.750.000,00 | 4 | 282.527.500,00 | 4 | 287.332.775,00 | 4 | 294.166.103,00 | | |
| 4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan<br><br>Pengelolaan Informasi Hukum | | | | 125.000.000,00 | | 126.250.000,00 | | 128.072.228,00 | | 132.787.625,00 | | 137.373.563,00 | | |
| Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 1200 | 500 | 125.000.000,00 | 500 | 126.250.000,00 | 500 | 128.072.228,00 | 500 | 132.787.625,00 | 500 | 137.373.563,00 | | |
| 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | 2.060.000.000,00 | | 2.082.900.000,00 | | 2.114.000.000,00 | | 2.157.200.000,00 | | 2.207.800.000,00 | | |
| Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Adminitrasi Pembangunan | Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi serta pelaporan yang terlaksana | 90,00 | 92,50 | 360.000.000,00 | 93,00 | 364.001.941,00 | 92,25 | 369.436.893,00 | 92,75 | 376.986.408,00 | 93,25 | 385.829.127,00 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah | |
| 4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | | 360.000.000,00 | | 364.001.941,00 | | 369.436.893,00 | | 376.986.408,00 | | 385.829.127,00 | | |
| Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 1 | 1 | 360.000.000,00 | 1 | 364.001.941,00 | 1 | 369.436.893,00 | 1 | 376.986.408,00 | 1 | 385.829.127,00 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | 150.000.000,00 | | 151.901.941,00 | | 155.215.893,00 | | 156.623.198,00 | | 160.090.602,00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 1 | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 151.901.941,00 | 1 | 155.215.893,00 | 1 | 156.623.198,00 | 1 | 160.090.602,00 | | |
| 4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | 90.000.000,00 | | 90.900.000,00 | | 91.809.000,00 | | 94.727.090,00 | | 97.654.361,00 | | |
| Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 12 | 12 | 90.000.000,00 | 12 | 90.900.000,00 | 12 | 91.809.000,00 | 12 | 94.727.090,00 | 12 | 97.654.361,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 120.000.000,00 | | 121.200.000,00 | | 122.412.000,00 | | 125.636.120,00 | | 128.084.164,00 | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 12 | 12 | 120.000.000,00 | 12 | 121.200.000,00 | 12 | 122.412.000,00 | 12 | 125.636.120,00 | 12 | 128.084.164,00 | | |
| Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan BidangPengadaan Barang dan Jasa | Persentase kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektornik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana | 75,00 | 91,00 | 750.000.000,00 | 92,00 | 758.337.387,00 | 93,00 | 769.660.194,00 | 94,00 | 785.388.350,00 | 95,00 | 803.810.680,00 | | |
| 4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 750.000.000,00 | | 758.337.387,00 | | 769.660.194,00 | | 785.388.350,00 | | 803.810.680,00 | | |
| Meningkatkan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 4 | 4 | 750.000.000,00 | 4 | 758.337.387,00 | 4 | 769.660.194,00 | 4 | 785.388.350,00 | 4 | 803.810.680,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 155 | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | | |
| 4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 250.000.000,00 | | 252.500.000,00 | | 255.025.000,00 | | 259.575.250,00 | | 260.151.003,00 | | |
| Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | 4 | 250.000.000,00 | 4 | 252.500.000,00 | 4 | 255.025.000,00 | 4 | 259.575.250,00 | 4 | 260.151.003,00 | | |
| 4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | 255.000.000,00 | | 257.550.000,00 | | 259.075.500,00 | | 267.575.755,00 | | 283.151.008,00 | | |
| Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 4 | 4 | 255.000.000,00 | 4 | 257.550.000,00 | 4 | 259.075.500,00 | 4 | 267.575.755,00 | 4 | 283.151.008,00 | | |
| 4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 245.000.000,00 | | 248.287.387,00 | | 255.559.694,00 | | 258.237.345,00 | | 260.508.669,00 | | |
| Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 155 | 150 | 245.000.000,00 | 150 | 248.287.387,00 | 150 | 255.559.694,00 | 150 | 258.237.345,00 | 150 | 260.508.669,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian dan SDA | Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian, dan sumber daya alam yang terlaksana | 90,00 | 91,00 | 950.000.000,00 | 92,00 | 960.560.672,00 | 93,00 | 974.902.913,00 | 94,00 | 994.825.242,00 | 95,00 | 1.018.160.193,00 | | |
| 4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | 300.000.000,00 | | 304.060.672,00 | | 308.837.913,00 | | 317.090.300,00 | | 327.181.203,00 | | |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif | | | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 4 | 6 | 300.000.000,00 | 6 | 304.060.672,00 | 6 | 308.837.913,00 | 6 | 317.090.300,00 | 6 | 327.181.203,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 6 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | 150.000.000,00 | | 152.560.672,00 | | 155.015.000,00 | | 159.545.150,00 | | 166.090.602,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 4 | 6 | 150.000.000,00 | 6 | 152.560.672,00 | 6 | 155.015.000,00 | 6 | 159.545.150,00 | 6 | 166.090.602,00 | | |
| 4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | 100.000.000,00 | | 101.000.000,00 | | 102.817.913,00 | | 106.030.100,00 | | 109.060.401,00 | | |
| Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 6 | 4 | 100.000.000,00 | 4 | 101.000.000,00 | 4 | 102.817.913,00 | 4 | 106.030.100,00 | 4 | 109.060.401,00 | | |
| 4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | 50.000.000,00 | | 50.500.000,00 | | 51.005.000,00 | | 51.515.050,00 | | 52.030.200,00 | | |
| Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 4 | 4 | 50.000.000,00 | 4 | 50.500.000,00 | 4 | 51.005.000,00 | 4 | 51.515.050,00 | 4 | 52.030.200,00 | | |
| 4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | | 650.000.000,00 | | 656.500.000,00 | | 666.065.000,00 | | 677.734.942,00 | | 690.978.990,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 4 | 6 | 650.000.000,00 | 6 | 656.500.000,00 | 6 | 666.065.000,00 | 6 | 677.734.942,00 | 6 | 690.978.990,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 4 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 9 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 600.000.000,00 | | 606.000.000,00 | | 615.060.000,00 | | 626.219.892,00 | | 638.948.790,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 9 | 4 | 600.000.000,00 | 4 | 606.000.000,00 | 4 | 615.060.000,00 | 4 | 626.219.892,00 | 4 | 638.948.790,00 | | |
| 4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | 40.000.000,00 | | 40.400.000,00 | | 40.804.000,00 | | 41.212.040,00 | | 41.624.160,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 4 | 6 | 40.000.000,00 | 6 | 40.400.000,00 | 6 | 40.804.000,00 | 6 | 41.212.040,00 | 6 | 41.624.160,00 | | |
| 4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | 10.000.000,00 | | 10.100.000,00 | | 10.201.000,00 | | 10.303.010,00 | | 10.406.040,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 4 | 6 | 10.000.000,00 | 6 | 10.100.000,00 | 6 | 10.201.000,00 | 6 | 10.303.010,00 | 6 | 10.406.040,00 | | |

Sumberdata : SIPD Bangda 2025

## 4.2. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas merupakan serangkaian program terpilih yang dianggap paling penting dan mendesak untuk dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Program prioritas mengacu pada janji politik Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2025-2029 yang telah dilakukan penyelarasan antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan 22 (dua puluh dua) Program Prioritas serta 59 aktivitas/kerja prioritas. Pelaksanaan program prioritas diharapkan mampu mencapai tujuan Pembangunan yang lebih terarah dan efektif.

Untuk menggambarkan bagaimana program prioritas Kepala Daerah akan di implementasikan dalam Pembangunan Kabupaten Probolinggo pada periode RPJMD tahun 2025-2029, dilakukan pemetaan dengan cara *cascading* atau penurunan tujuan strategis dari level atas ke level yang lebih rendah secara sistematis, agar seluruh bagian organisasi memiliki arah dan prioritas yang selaras.

Tabel 4.4
Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah** | | | | |
| 1. | 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD | 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi | |
| | | | 4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| 2. | 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesra | 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | |
| | | | 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | a. SAE GUS-TREN (PROBOLINGGO MENGETUK LANGIT KEGIATAN KEAGAMAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL)<br>b. SAE BERIBADAH (TEMPAT IBADAH SEMUA AGAMA NYAMAN DAN SAE)<br>c. AGAMA NYAMAN DAN SAE), SAE GUS TREN (RP 20 MILIAR BANTUAN UNTUK PESANTREN KECIL, MADIN, TPQ) |
| | | | 4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | SAE GUS-TREN (EKOTREN: PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PESANTREN) |
| | | Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dna Pelaporan Bidang Hukum | 4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | |
| | | | 4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | a. SAE AKSES PERLINDUNGAN HUKUM (KARTU SAE LAW CARE)<br>b. SAE DISABILITAS DAN WARGA RENTAN (REGULASI DAERAH YANG MELINDUNGI DISABILITAS) |
| | | | 4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum | a. SAE KESEMPATAN KERJA (REGULASI 70% PEMANFAATAN TENAGA KERJA LOKAL)<br>b. SAE BERTANI (PERDA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan BidangPengadaan Barang dan Jasa | 4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | |
| | | | 4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |

Sumberdata : SIPD Bangda 2025

### 4.3. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan Sekretariat Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi;
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama;
3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses;
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan /penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan;
6. Efektif, data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yag mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dilakukan dengan langkah–langkah sebagai berikut :

a. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah);
b. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);

c. Identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

### 4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang mencerminkan tingkat pencapaian atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Indikator Kinerja Utama disusun secara sistematis dan terukur untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan program serta kegiatan Sekretariat Daerah, dalam rangka memastikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya. Penentuan target keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU-PD) yang juga memiliki keterkaitan dengan IKU Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Berikut ini tabel indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Tabel. 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah | | | | | | | | | |
| 2. | Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja | Nilai | 10,59 | 10,93 | 11,01 | 11,08 | 11,16 | 11,24 | 11,32 | |
| 3. | Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Minimal Diatas 85 | % | 61 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| 4. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |

Sumberdata : hasil rencana-SIPD Bangda 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo menetapkan sejumlah indikator sasaran strategis dengan target terukur secara tahunan mulai tahun 2025 hingga 2030. Indikator-indikator ini mencerminkan fokus pembangunan kelembagaan, pelayanan publik, hukum, komunikasi, kepegawaian, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Komitmen penuh terhadap pelayanan publik ditunjukkan dengan target 100% capaian untuk beberapa indikator penting seperti pembinaan dan pelayanan keagamaan, penyusunan produk hukum daerah, penyelesaian permasalahan hukum, termasuk hukum non-litigasi dan HAM, serta kerja sama dengan dunia usaha dan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan. Hal ini menandakan bahwa Sekretariat Daerah senantiasa menjamin keberlanjutan layanan dan tata kelola yang profesional.

Dari sisi pengelolaan anggaran dan pengadaan, indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa ditargetkan meningkat dari kategori Baik (80) pada 2024 menjadi Sangat Baik (96) pada tahun 2030. Hal ini menjadi indikator penting dalam memastikan efisiensi dan akuntabilitas belanja publik.

Dalam aspek penerimaan daerah, efektivitas pencapaian target retribusi ditargetkan meningkat secara perlahan dari 55,66% pada 2024 menjadi 56% pada 2030, sebagai bentuk upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk meningkatkan kualitas layanan internal, nilai kepuasan layanan administrasi ditargetkan naik dari 75 ke 90, sementara indikator persentase ASN yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan akan ditingkatkan dari 45% menjadi 95% pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan upaya penguatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan, ditetapkan target peningkatan layanan kepegawaian yang terdigitalisasi dari 40% menjadi 100%, dan dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi dari 50% menjadi 100% pada akhir tahun 2030. Ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi menuju pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menggambarkan arah strategis Sekretariat Daerah dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, kolaboratif, dan inovatif dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029.

### 4.5. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah telah berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak nyata terhadap masyarakat. Indikator Kinerja Kunci disusun untuk masing-masing urusan pemerintahan dan mencerminkan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah.

IKK digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan strategis, memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis kinerja, serta memperkuat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Setiap indikator dirancang secara

spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART), serta disertai dengan target tahunan selama periode perencanaan 2025–2029 guna memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah secara terarah dan terukur.

**Tabel. 4.6**

Indikator Kinerja Daerah Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | |
| **I** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai SAKIP | Nilai | 67,11 | 70,50 | 71,00 | 71,50 | 72,00 | 72,50 | 73,00 | |
| 2 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,45 | 4,51 | 4,55 | |
| **II** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja | Nilai | 10,59 | 10,93 | 11,01 | 11,08 | 11,16 | 11,24 | 11,32 | |
| 2 | Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Minimal Diatas 85 | % | 61 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| 3 | Persentase kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi Kewilayahan dan otonomi serta Kerjasama daerah yang terlaksana | % | 98,06 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | |
| 4 | Persentase implementasi Renaksi Peningkatan IRH | % | 87,32 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| 5 | Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana | % | 99,74 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | |
| 6 | Persentase kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana | % | 90,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Persentase kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektornik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana | % | 75,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | |
| 8 | Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana | % | 100 | 92,00 | 92,25 | 92,50 | 92,75 | 93,00 | 93,25 | |
| 9 | Persentase PD dengan Nilai IKM minimal diatas 85 | % | 61,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | |
| 10 | Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi serta pelaporan yang terlaksana | % | 90,00 | 92,00 | 92,50 | 93,00 | 92,25 | 92,75 | 93,25 | |
| 11 | Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian, dan sumber daya alam yang terlaksana | % | 90,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | |
| 12 | Persentase PD dengan Nilai Pelaporan Kinerja minimal 11 Pada LHE AKIP PD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 13 | Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana | % | 90,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| 14 | Persentase Kebijakan di bidang TU pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, RT dan perlengkapan yang dilaksanakan | % | 90,00 | 92,00 | 92,25 | 92,50 | 92,75 | 93,00 | 93,25 | |
| 15 | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) | Indeks | 2,95 | 3,06 | 3,11 | 3,16 | 3,21 | 3,26 | 3,29 | |

Tabel. 4.7
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1. | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | |
| 2. | Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja | positif | Nilai | 10,59 | 10,93 | 11,01 | 11,08 | 11,16 | 11,24 | 11,32 | |
| 3. | Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Minimal Diatas 85 | positif | % | 61 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| 4. | Persentase kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana | positif | % | 90,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | |
| 5. | Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana | positif | % | 100 | 92,00 | 92,25 | 92,50 | 92,75 | 93,00 | 93,25 | |
| 6. | Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian, dan sumber daya alam yang terlaksana | positif | % | 90,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | |
| 7. | Persentase kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektornik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana | positif | % | 75,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana | positif | % | 99,74 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | |
| 9. | Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana | positif | % | 90,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| 10. | Persentase Kebijakan di bidang TU pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, RT dan perlengkapan yang dilaksanakan | positif | % | 90,00 | 92,00 | 92,25 | 92,50 | 92,75 | 93,00 | 93,25 | |
| 11. | Persentase PD dengan Nilai IKM minimal diatas 85 | positif | % | 61,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | |
| 12. | Persentase PD dengan Nilai Pelaporan Kinerja minimal 11 Pada LHE AKIP PD | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 13. | Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi serta pelaporan yang terlaksana | positif | % | 90,00 | 92,00 | 92,50 | 93,00 | 92,25 | 92,75 | 93,25 | |
| 14. | Persentase implementasi Renaksi Peningkatan IRH | positif | % | 87,32 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| 15. | Persentase kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi Kewilayahan dan otonomi serta Kerjasama daerah yang terlaksana | positif | % | 98,06 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | |
| 16. | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) | positif | Indeks | 2,95 | 3,06 | 3,11 | 3,16 | 3,21 | 3,26 | 3,29 | |

Sumberdata : SIPD Bangda 2025

Berdasarkan tabel 4.6 indikator kinerja daerah (IKD) adalah sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, Sekretariat Daerah menetapkan dua indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, yaitu : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP).

**1. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**

Pada tahun 2024, Nilai SAKIP berada pada kategori B dengan skor 67,11. Target capaian Nilai SAKIP ditetapkan meningkat secara bertahap setiap tahun, mencerminkan penguatan reformasi birokrasi yang meliputi aspek manajemen perubahan, penataan kelembagaan, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Target Nilai SAKIP adalah mencapai skor 73 dengan kategori A pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Probolinggo menargetkan pencapaian birokrasi berkelas dunia (world class bureaucracy) yang adaptif, kolaboratif, Kapabel, Responsif, serta Berintegrtas dan melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (human-based) secara prima.

**2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)**

Nilai Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 adalah 4,20 dengan kategori B. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara konsisten, dengan capaian target IPP sebesar 4,55 pada tahun 2030. Kenaikan indeks ini diharapkan terjadi seiring dengan peningkatan standar pelayanan minimum, digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Berdasarkan tabel. 4.7 indikator kinerja kunci (IKK) dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Sekretariat Daerah menetapkan beberapa indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja kelembagaan dan kepatuhan terhadap norma serta standar pelayanan yang berlaku. Indikator tersebut meliputi Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Kemantapan Organisasi.

**1. Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik**

Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan standar pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Meskipun belum terdapat baseline pada tahun 2024, pada tahun 2025 ditargetkan mencapai nilai 81,30, dengan tren peningkatan secara bertahap hingga mencapai 82,70 pada tahun 2030. Target ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas dan sistem pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan.

**2. Nilai Kematangan Kelembagaan**

Indeks ini mengukur kapasitas dan kematangan organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Walaupun belum tersedia data awal tahun 2024, Pemerintah Daerah menetapkan nilai awal Sedang (29,77) pada tahun 2025 dengan target peningkatan bertahap menjadi Sedang (29,90) pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan upaya yang konsisten dalam menata struktur organisasi, memperbaiki proses bisnis internal, dan

menguatkan tata kelola kelembagaan agar lebih responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Probolinggo Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkanjutan. Renstra ini mengacu pada misi pembangunan daerah, khususnya Misi ke-1 RPJMD SAE PEMERINTAHAN yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif”. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan berorientasi pada hasil.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai panduan bersama untuk menjalankan tugas dan pelayanan publik dengan lebih baik. Kami menyadari bahwa tantangan ke depan tidak mudah, tapi dengan kerja sama dan semangat tinggi dari seluruh jajaran, serta dukungan masyarakat, kita bisa mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang lebih maju, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.

## 5.1. Kaidah Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan peralihan ini bertujuan untuk menyajikan berbagai hal penting terkait pelaksanaan perencanaan jangka menengah daerah dan menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas pembangunan, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan program. Tata cara pelaksanaan masa peralihan RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perlu segera disusun dokumen perencanaan spasial baik di level makro (RTRW) maupun di level mikro (RDTR) untuk melihat relevansi pencapaian target kinerja dan intervensi program dalam RENSTRA dengan sebaran data spasial. Dengan demikian strategi pencapaian target dapat lebih spesifik.
2. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, agar melakukan koordinasi, baik pada tiap rumpun atau lintas rumpun (*Joint Outcomes*) untuk memastikan pencapaian *outcome* RENSTRA berjalan dengan efektif dan efisien;

## 5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Mekanisme pengendalian melibatkan tim dari internal Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo seperti pelaksana urusan perencanaan dan pengawasan serta lembaga lain terkait untuk memantau progres, dengan evaluasi dilakukan setiap semester menggunakan indikator kinerja. Laporan kinerja disampaikan ke Bupati Probolinggo, dan hasil evaluasi menjadi dasar penyesuaian program. Untuk memastikan RENSTRA Sekretariat Daerah 2025 – 2029 berjalan sesuai rencana, mekanisme pengendalian dan evaluasi meliputi: a) Jadwal evaluasi periodik, setiap triwulan atau tahunan, dengan laporan kemajuan disampaikan ke Bupati; b) Indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur pencapaian target, seperti capaian pembangunan infrastruktur, peningkatan IPM, atau penurunan angka kemiskinan; c) Mekanisme penyesuaian rencana berdasarkan hasil evaluasi, termasuk revisi program jika diperlukan; d) Pembentukan Tim Pengendali: Tim terdiri dari Bappeda, Inspektorat, dan perangkat daerah dan pihak lain terkait, dengan jadwal rapat bulanan untuk memantau progres dan tindak lanjutnya.

Mari kita jadikan Renstra ini sebagai komitmen bersama untuk terus berinovasi, berkoordinasi, dan memberikan yang terbaik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kami mengajak seluruh jajaran Sekretariat Daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan Renstra ini dengan penuh komitmen, disiplin, dan inovasi. Kolaborasi yang erat dengan seluruh perangkat daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini menjadi landasan kuat dalam mengawal perubahan dan kemajuan Kabupaten Probolinggo menuju masa depan yang lebih baik.

Probolinggo, 26 September 2025

**SEKRETARIS DEARAH**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**IGAS IRWANTO, S.Sos,. M.Si**
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

# BPPKAD

## KABUPATEN PROBOLINGGO

## TAHUN ANGGARAN 2025 -2029

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 – 2029. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, Kegiatan dan Subkegiatan BPPKAD Tahun 2026-2030 sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi pada hasil

Kami berharap agar Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Serta peran masing-masing bidang dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Probolinggo, 21 **Agustus** 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730215 199302 2 002

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**DAFTAR ISI** ..... **ii**
**DAFTAR TABEL** ..... **iv**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **v**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 7
1.4 Sistematika Penulisan ..... 8
**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** ..... **9**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 9
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala BPPKAD ..... 10
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional pada Sekretariat BPPKAD; ..... 10
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional pada bidang BPPKAD. ..... 12
2.1.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Probolinggo ..... 25
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ..... 26
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ..... 26
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ..... 27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ..... 30
2.3.1 Matrik review pencapaian kinerja pelayanan PD (indikator kinerja dari SPM, IKU, IKK) ..... 30
2.3.2 Matrik anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan PD..... 36
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah..... 62
Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja..... 62
2.4.1 Peluang-Peluang Strategis BPPKAD Ke Depan ..... 62
2.4.2 Tantangan BPPKAD ke Depan ..... 64

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ..... 65
2.6 Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Program RPJMD Kab Probolinggo ..... 67
2.6.1 Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 .... 69
2.6.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ..... 73
2.7 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi ..... 76
2.7.1 Telaahan Renstra Provinsi ..... 80
2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. ..... 81
2.9 Penentuan Isu-isu Strategis ..... 83
2.9.1 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS) ..... 84
**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 97**
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... 97
**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 113**
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, Output , Outcome ..... 113
**BAB V PENUTUP ..... 199**
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 199
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 200

# DAFTAR TABEL


Table 1 - Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) ..27
Table 2 - Tabel TC.23 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BPPKAD KABUPATEN PROBOLINGGO.....31
Table 3 - Tabel TC-24 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BPPKAD KABUPATEN PROBOLINGGO .....36
Table 4 - Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.....66
Table 5 - Penjelasan Pokok-pokok Visi.....68
Table 6 - Keterkaitan Pokok-pokok Visi Terhadap Misi .....69
Table 7 - Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Untuk Menjawab Isu Strategis .....72
Table 8 - Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo .....75
Table 9 - Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L .....79
Table 10 - Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....81
Table 11 - Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....82
Table 12 - Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah .....85
Table 13 - Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BPPKAD .....99
Table 14 - Penahapan RENSTRA BPPKAD .....107
Table 15 - Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA BPPKAD .....110
Table 16 - Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan .....114
Table 17 - Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator Program/ Kegiatan.....149
Table 18 - Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan BPPKAD - Pemerintah Kabupaten Probolinggo .....158
Table 19 - Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah - Rancangan Akhir RENSTRA Pemerintah Kabupaten Probolinggo .....188
Table 20 - Indikator Kinerja Utama (IKU) – BPPKAD .....193
Table 21 - Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....196

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Bagan Struktur Organisasi .....25

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025-2029 dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris) dan Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi) yang telah di lantik pada tanggal 20 Februari 2025, menuangkan visi, misi, dan komitmen politik dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2025 hingga 2029. Penyusunan RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, serta unsur penunjang, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 (ayat 29), Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 di unsur penunjang Keuangan Daerah.

Selanjutnya Renstra BPPKAD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu Lima tahun. Renstra BPPKAD juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan BPPKAD. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra BPPKAD berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan unsur penunjang keuangan daerah.

Dalam menyusun Renstra BPPKAD terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah,

penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyelarasan arah tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Disamping hal tersebut Renstra BPPKAD Kabupaten Probolinggo juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868)
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian

di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D));
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E)
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor; 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Probolinggo Tahun 2025 – 2029.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahun;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi target tujuan dan sasaran pembangunan daerah kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 .

Adapun tujuan penyusunan Renstra BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029;

2. Memberikan gambaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPPKAD yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan
- 2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja Kunci (IKK)
- 2.3 Data dan Informasi
- 2.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.5 Identifikasi Permasalahan
- 2.6 Permasalahan
- 2.7 Identifikasi Isu Strategis Daerah
- 2.8 Rumusan Isu Strategis Daerah (Permasalahan, Isu Strategis dan Potensi Daerah)

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPPKAD – Tujuan dan Saran RPJMD 2025 - 2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, Output , Outcome

BAB V. PENUTUP.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 BAB XXVII Bagian Kesatu Pasal 370 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. BPPKAD Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi "Penunjang di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". BPPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang merangkap sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1) Susunan Organisasi BPPKAD, terdiri dari:

a) Kepala Badan;

b) Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c) Bidang Anggaran, membawahi:

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Kebijakan Anggaran;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d) Bidang Perbendaharaan, membawahi:

1. Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah;
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e) Bidang Akuntansi, membawahi:

1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
2. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f) Bidang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:

1) Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah;
2) Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan;
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

g) Bidang Pendapatan, membawahi:

1. Sub Bidang Penetapan;
2. Sub Bidang Penagihan;

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

h) Kelompok Jabatan Fungsional;

i) UPT.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 3, huruf g angka 3 bertanggungjawab kepada Pejabat Tinggi Pratama melalui Pejabat Administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksana tugas jabatan fungsional.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertanggangungjawab kepada Kepala Badan.

(8) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

### 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala BPPKAD

1. Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
   a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
   b. pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah di bidanganggaran, perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan;
   c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan daerah;
   d. pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;
   e. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional pada Sekretariat BPPKAD;

**1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris**

1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
   a. Pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
   b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
   c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
   d. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
   e. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
   f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur (sop);
   g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan.

**2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
   b. Pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
   c. Penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
   d. Penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
   f. Penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan

ketatalaksanaan;

g. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

**3. Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;

e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;

f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

### 2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional pada bidang BPPKAD.

**1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Anggaran**

1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan teknis bidang Anggaran;

b. Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan Anggaran;

c. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan penyusunan Anggaran;

d. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;

e. Pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi

penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan anggaranperangkat Daerah dan SKPKD;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Anggaran;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran**

1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi, Fasilitasi, serta Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan perubahannya;

b. Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan perubahannya;

c. Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya;

d. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan perubahannya;

e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**3. Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran**

1. Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan anggaran daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebijakan anggaran pendapatan;

b) Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebijakan anggaran belanja daerah;

c) Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebijakan anggaran pembiayaan;

d) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)– Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan

Umum Perubahan Anggaran (KUPA) - Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P);

e) Pelaksanaan penyusunan naskah Kebijakan Umum Anggaran (KUA)–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) - Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P);

f) Pelaksanaan koordinasi persiapan proses kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) - Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P);

g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**4. Kelompok Jabatan Fungsional**

a) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 371 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai fungsi:

b) Perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah;

c) Penyusunan pedoman standar harga satuan (shs), analisa standar belanja (asb), harga satuan pokok kegiatan (hspk), rka-skpd;

d) Pembinaan penganggaran daerah atas kebijakan teknis dan peraturan teknis yang diterbitkan;

e) Pelaksanaan analisis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perbendaharan**

1. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
   a) Perumusan dan penyusunan kegiatan perbendaharaan;
   b) Pengendalian atas penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d);
   c) Pengendalian pengelolaan gaji ASN;
   d) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
   e) Pembinaan pengelolaan kas daerah;
   f) Pelaksanaan koordinasi kerjasama instansi atau lembaga terkait perbendaharaan;
   g) Perumusan dan penyusunan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
   h) Perumusan dan penyusunan kegiatan pengelolaan data dan implementasi sipd;

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

**6. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah**

1. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan belanja daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai fungsi:
   a) Penyusunan rencana kerja sub bidang penatausahaan belanja daerah;
   b) Pelaksanaan pelaporan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya;
   c) Pelaksanaan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer;
   d) Pelaporan penggunaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
   e) Pelaksanaan penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d);
   f) Pelaksanaan pengujian kebenaran daftar penguji atas penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d);
   g) Pengelolaan data gaji asn;
   h) Pelaksanaan rekonsiliasi pemotongan fihak ketiga (pfk) non pajak pusat atas surat perintah pencairan dana (sp2d).
   i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**7. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah**

1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kas daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:
   a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
   b) Penyiapan ketersediaan kas daerah;
   c) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
   d) Pemrosesan penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
   e) Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban RKUD sesuai dengan dokumen SP2D;
   f) Pelaksanaan penatausahaan penerimaan kembali pemberian pinjaman;
   g) Pelaksanaan pemantauan arus kas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah baik oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan

Lainnya yang ditunjuk;

h) Pelaksanaan rekonsiliasi Pemotongan Fihak Ketiga (PFK) Pajak Pusat yang disetor ke RKUN;
i) Pelaksanaan rekonsiliasi kas daerah;
j) Pelaksanaan pengelolaan utang piutang pada Bendahara Umum Daerah dan koreksi kas daerah;
k) Penatausahaan pinjaman daerah dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah;
l) Penatausahaan dana cadangan pemerintah daerah;
m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

a) Pengendalian belanja daerah;
b) Pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah daerah dan pagu pada apbd;
c) Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada perangkat daerah dalam rangka rekonsiliasi pengeluaran;
d) Pemeriksaan keabsahan surat perintah membayar (spm) dan kelengkapannya;
e) Perumusan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd;
f) Pembinaan penatausahaan dan sipd keuangan daerah;
g) Perumusan dan pemanfaatan sipd keuangan daerah;
h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Akuntansi**

1. Kepala bidang akuntansi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi selain kas serta penyusunan laporan keuangan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang akuntansi mempunyai fungsi:
   a) Penyusunan perencanaan teknis bidang akuntansi;
   b) Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan akuntansi;
   c) Pengendalian dan pengoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah;

d) Pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban apbd dan blud, dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
e) Pengoordinasian dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd;
f) Penyusunan tanggapan terhadap lhp bpk atas laporan keuangan daerah;
g) Pengoordinasian, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
h) Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd;
i) Penyusunan sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
j) Pengoordinasian dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah;
k) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang akuntansi;
l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

**10. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan**

1. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Sub Bidang akuntansi pendapatan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai fungsi:
   a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
   b) Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi pendapatan dan akuntansi selain kas;
   c) Pelaksanaan kebijakan dan sistim akuntansi pendapatan daerah serta kebijakan dan sistem akuntansi selain kas;
   d) Pelaksanaan pencatatan atas seluruh kejadian terkait pendapatan daerah dan kejadian selain kas, yang berpengaruh pada penyajian laporan keuangan daerah;
   e) Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
   f) Pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan pendapatan dengan rekening kas umum daerah;

g) Penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait pendapatan daerah dan akuntansi selain kas dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
h) Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i) Pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait pendapatan daerah dan akuntansi selain kas;
j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**11. Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja**

1. Kepala sub bidang akuntansi belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di sub bidang akuntansi belanja daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bidang akuntansi belanja mempunyai fungsi:
   a) Pelaksananan rekonsiliasi data belanja daerah dan pembiyaan dalam rangka pelaksanaan kosolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
   b) Pelaksananan rekonsiliasi antara pencatatan belanja dan pembiayaan daerah dengan rekening kas umum daerah;
   c) Penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
   d) Pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait belanja dan pembiayaan daerah;
   e) Pelaksanaan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
   f) Pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
   g) Penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
   h) Pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait belanja dan pembiayaan daerah;
   i) Pelaksanaan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
   j) Pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
   k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**12. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pelaporan;
b) Penyiapan bahan, data dan kertas kerja dan fasilitasi teknis pelaksanaan penyusunan laporan semesteran, prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan;
c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis pelaksanaan penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjabarannya;
d) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan semesteran, prognosis dan laporan keuangan perangkat daerah pada tahun anggaran berkenaan;
e) Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun anggaran berkenaan;
f) Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggunjawaban pelaksanaan APBD;
g) Pengoordinasian, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
h) Penyusunan analisis laporan pertanggungjawabn pelaksanaan APBD;
i) Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
j) Pengoordinasian dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah;
k) Pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan perangkat daerah;
l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**13. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

1. Kepala bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai fungsi:
   a. Perumusan kebijakan penyusunan standar harga, standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
   b. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan kebutuhan barang

milik daerah;

c. Perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
d. Perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;
e. Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
f. Pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
g. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
i. Pelaksanaan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
j. Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
k. Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
l. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

**14. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah**

1. Kepala sub bidang penatausahaan dan penggunaan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penatausahaan dan penggunaan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bidang penatausahaan dan penggunaan barang milik daerah mempunyai fungsi:
   a) Penyusunan standar harga, standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
   b) Pengumpulan bahan dan data rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) organisasi perangkat daerah;
   c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;
   d) Pelaksaanaan desk, evaluasi dan verifikasi rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) organisasi perangkat daerah;
   e) Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
   f) Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
   g) Pelaksanaan penerimaan dan pencatatan barang milik daerah;
   h) Pelaksaanaan rekonsiliasi barang milik daerah organisasi perangkat daerah;

i) Pelaksanaan pembinaan barang milik daerah organisasi perangkat daerah;

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**15. Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai fungsi:**

1. Kepala sub bidang penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
2. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bidang penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan mempunyai fungsi:
   a) Penyiapan bahan dan data pemindahtanganan aset;
   b) Penyiapan bahan dan data proses pemusnahan aset;
   c) Penyiapan bahan dan data proses penghapusan aset;
   d) Penyiapan bahan dan data proses tuntutan ganti rugi;
   e) Penyusunan laporan pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset;
   f) Penyiapan bahan dan data proses penilaian barang milik daerah;
   g) Penyiapan bahan dan data proses pemindahtanganan barang milik daerah;
   h) Penyiapan bahan dan data proses pemusnahan barang milik daerah;
   i) Penyiapan bahan dan data proses penghapusan barang milik daerah;
   j) Penyiapan bahan dan data proses tuntutan ganti rugi (tgr) barang milik daerah;
   k) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
   l) Pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
   m) Pelaksanaan pembinaan barang milik daerah pada organisasi perangkat daerah;
   n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang

**16. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai fungsi:

a) Pengumpulan data pemanfaatan Barang Milik Daerah;

b) Pengumpulan data pengamanan fisik, administrasi dan hukum Barang Milik daerah;
c) Pelaksanakan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah;
d) Pelaksanaan pengamanan barang Milik Daerah;
e) Pelaksanaan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah;
f) Pelaksanaan kegiatan asuransi gedung dan kendaraan;
g) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah;
h) Pelaksanaan pembinaan barang milik daerah Organisasi Perangkat Daerah;
i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**17. Kepala Bidang Pendapatan**

1. Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pendapatan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
   a) Perumusan rencana dan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
   b) Pengidentifikasian dan menganalisa data potensi pendapatan daerah;
   c) Pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah;
   d) Pengoordinir pengelolaan pendapatan daerah;
   e) Pelaksanaan pendataan dan penetapan pendapatan daerah;
   f) Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penagihan piutang daerah;
   g) Pelaksanaan, pengawasan dan penindakan penerimaan/ pendapatan;
   h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

**18. Kepala Sub Bidang Penetapan**

1. Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penetapan pendapatan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai fungsi:
   a) Penyusunan perencanaan, penetapan pendapatan daerah;
   b) Penyiapan nota perhitungan dan penetapan pajak daerah;
   c) Penyiapan surat ketetapan pajak daerah;

d) Pemrosesan dan menyampaikan surat ketetapan pajak daerah;
e) Pelaksanaan penatausahaan, monitoring dan evaluasi surat ketetapan pajak daerah;
f) Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak daerah;
g) Pelaksanaan analisis kebijakan pajak daerah;
h) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
i) Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
j) Penginventarisasian, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pajak daerah;
k) Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb);
l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**19. Kepala Sub Bidang Penagihan**

1. Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi:
   a) Pelaksanaan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah;
   b) Pelaksanaan penatausahaan piutang pajak, penundaan pembayaran dan angsuran tunggakan pajak;
   c) Penyiapan usulan penghapusan piutang pajak;
   d) Penyiapan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
   e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;
   f) Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
   g) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak daerah;
   h) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
   i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**20. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf g angka 3 mempunyai fungsi:

a) Penyiapan bahan koordinasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan;
b) Pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian

pembayaran pajak daerah;

c) Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap objek dan subjek pajak daerah;
d) Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah;
e) Pelaksanaan penindakan atas pelanggaran pajak dan retribusi daerah;
f) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
g) Pelaksanaan legalisasi benda berharga dan objek pajak daerah;
h) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan pendapatan;
i) Penyiapan bahan koordinasi untuk pelaksanaan, pemberdayaan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah;
j) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang

Adapun Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BPPKAD Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

## 2.1.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Probolinggo

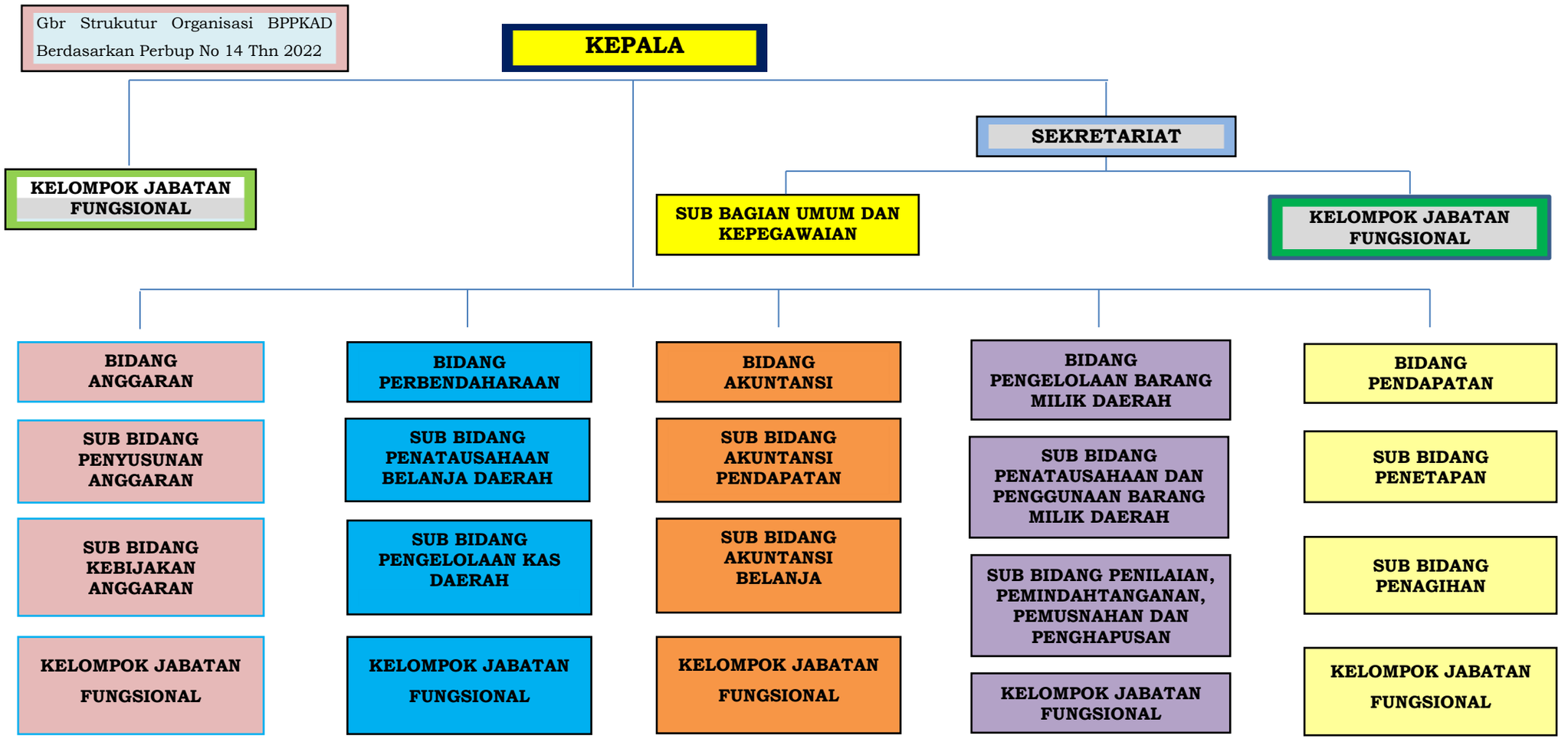


**Gambar 1 - Bagan Struktur Organisasi**

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan fungsi Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo sebanyak 99 Orang, yang terdiri dari:

1. Pegawai menurut eselon, sebagai berikut:

| NO | Eselonisasi | Jumlah (org) |
|---|---|---|
| 1. | Eselon II | 1 |
| 2. | Eselon III | 5 |
| 3. | Eselon IV | 11 |
| 4. | Pejabat fungsional | 5 |
| 5. | Staf ASN:<br>Staf PPPK | 52<br>.... |
| 6. | Staf Non ASN | 25 |
| | **Jumlah** | **99** |

2. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal, sebagai berikut:

**a. ASN (PNS dan PPPK)**

| NO | Tingkat Pendidikan | Jumlah (org) |
|---|---|---|
| 1. | S-2 (Strata 2 / Magister) | 15 |
| 2. | S-1 (Sarjana / Strata 1) | 30 |
| 3. | D-4 (Diploma 4) | 2 |
| 4. | D-3 (Diploma 3) | 23 |
| 5. | D-1 (Diploma 1) | 0 |
| 6. | SLTA / Paket C | 4 |
| 7. | SD | 0 |
| | **Jumlah** | **74** |

**b. NON ASN**

| NO | Tingkat Pendidikan | Jumlah (org) |
|---|---|---|
| 1. | Sarjana S-2 (Pasca Sarjana) | 0 |
| 2. | Sarjana S-1 (Sarjana) | 9 |
| 3. | Diploma 4 (Diploma 4) | 0 |
| 4. | Diploma 3 (Diploma 3) | 2 |
| 5. | Diploma 1 (Diploma 1) | 0 |
| 6. | SLTA | 13 |
| 7. | Paket C | 1 |
| | **Jumlah** | **25** |

3. Pegawai ASN menurut Golongan/Ruang adalah, sebagai berikut:

| NO | Golongan/Ruang | Jumlah (org) |
|---|---|---|
| 1. | Pembina Utama Madya (IV/c) | 1 |
| 2. | Pembina Tingkat I (IV/b) | 1 |
| 3. | Pembina (IV/a) | 5 |
| 4. | Penata Tingkat I (III/d) | 12 |
| 5. | Penata (III/c) | 9 |
| 6. | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 10 |
| 7. | Penata Muda (III/a) | 10 |
| 8. | Pengatur Tingkat I (II/d) | 2 |
| 9. | Pengatur (II/c) | 22 |
| 10. | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | 0 |
| 11. | Pengatur Muda (II/a) | 0 |
| 12. | Golongan VII (PPPK) | 2 |
| | **Jumlah** | **74** |

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Sarana dan prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh BPPKAD sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Table 1 - Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

| No | Nama Barang | Jumlah aset yang dimiliki | | Keterangan | Jumlah aset yang tidak terpakai | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Nilai Perolehan | | Unit | Nilai Perolehan | |

| No | Nama Barang | Jumlah aset yang dimiliki | | Keterangan | Jumlah aset yang tidak terpakai | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Nilai Perolehan | | Unit | Nilai Perolehan | |
| 1 | Kendaraan Roda 4 | 42 | 10,402,653,519.00 | Jeep, Station Wagon, MPV, SUV, Minibus, Pick Up | 28 | 6,239,273,209.00 | Dobel Catat, Belum Pengalihan Status, Pinjam Pakai |
| 2 | Kendaraan Roda 2 | 41 | 781,388,596.00 | Sepeda Motor | 13 | 166,022,500.00 | Rusak Berat |
| 3 | PC Unit | 55 | 564,818,076.00 | Merk Samsung, LG, HP, Acer, Lenovo, Dell | 41 | 364,316,000.00 | Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya |
| 4 | Laptop | 138 | 1,924,430,113.00 | Merk Samsung, LG, HP, Acer, Lenovo, Dell, Toshiba, Sony, Asus, Axioo | 69 | 971,368,564.00 | Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya |
| 5 | Server | 12 | 833,445,375.00 | Merk Dell, Intel Xeon | | | |
| 6 | Tablet PC | 2 | 24,600,000.00 | Merk Samsung Galaxy Tab | | | |
| 7 | Monitor | 16 | 93,308,000.00 | Merk Samsung | 11 | 78,440,000.00 | Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya |
| 8 | Printer | 148 | 1,351,395,450.00 | Merk Epson, Canon, HP, Brother | 73 | 857,710,500.00 | Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya |
| 9 | Scanner | 22 | 452,765,780.00 | Merk Fujitsu, Canon, Plustek | 7 | 114,960,480.00 | Rusak Berat, Pinjam Pakai |
| 10 | Harddisk | 53 | 108,368,000.00 | Merk Toshiba, Western Digital | 30 | 60,700,200.00 | Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya |
| 11 | UPS | 14 | 102,457,900.00 | Merk APC, ICA, Prolink | 7 | 19,186,000.00 | Rusak Berat |

| No | Nama Barang | Jumlah aset yang dimiliki | | Keterangan | Jumlah aset yang tidak terpakai | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Nilai Perolehan | | Unit | Nilai Perolehan | |
| 12 | Router | 35 | 196,906,864.00 | Merk Mercusys, D-Link, Mikrotik | 23 | 119,737,000.00 | Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya |
| 13 | Meja | 191 | 720,072,100.00 | Meja Kerja Kayu, Meja Besi, Meja Pejabat, Meja Tamu | 87 | 156,937,500.00 | Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya |
| 14 | Kursi | 675 | 894,525,550.00 | Kursi Kayu, Kursi Besi, Kursi Pejabat, Kursi Tamu, Sofa | 289 | 201,857,750.00 | Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya |
| 15 | Partisi | 135 | 246,556,500.00 | Partisi Kayu, Sketsel | | | |
| 16 | Brankas | 125 | 472,841,229.00 | | 117 | 173,601,229.00 | Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya |
| 17 | Lemari Penyimpanan | 239 | 895,299,350.00 | Lemari Kayu, Lemari Besi, lemari Kaca | 75 | 273,775,500.00 | Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya |
| 18 | CCTV | 9 | 30,133,000.00 | | | | |
| 19 | Alat Penghancur Kertas | 21 | 128,877,284.00 | Merk Krisbow, Primatech, HSM | 9 | 56,147,500.00 | Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya |
| 20 | Proyektor | 9 | 161,570,000.00 | | | | |
| 21 | Layar Proyektor | 14 | 143,280,350.00 | | | | |
| 22 | Lemari Es | 6 | 23,045,500.00 | Merk Panasonic, Polytron, Sharp | | | |
| 23 | AC | 54 | 386,080,050.00 | AC Window, AC Split, AC Unit | 17 | 79,100,000.00 | Rusak Berat |

| No | Nama Barang | Jumlah aset yang dimiliki | | Keterangan | Jumlah aset yang tidak terpakai | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Nilai Perolehan | | Unit | Nilai Perolehan | |
| 24 | Televisi | 19 | 189,570,062.50 | Merk Panasonic, LG, Samsung, Sharp, Sony, Aqua | | | |
| 25 | Bracket | 5 | 16,859,000.00 | Bracket TV | | | |
| 26 | Kamera | 18 | 175,255,800.00 | Merk Canon, Nikon | 8 | 77,521,000.00 | Rusak Berat |
| 27 | Alat Pemadam Kebakaran | 29 | 28,241,250.00 | APAR | | | |
| 28 | Sound System | 11 | 129,663,000.00 | Sound System, Mic Wireless, Tape Recorder | | | |
| 29 | Dispenser | 10 | 19,320,800.00 | | | | |
| 30 | Papan Tulis | 4 | 6,230,000.00 | White Board | | | |
| 31 | Papan Nama | 53 | 103,201,700.00 | Papan Nama Aset | | | |
| 32 | Vacuum Cleaner | 3 | 8,500,000.00 | Merk Sanyo dan Modena | | | |

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

### 2.3.1 Matrik review pencapaian kinerja pelayanan PD (indikator kinerja dari SPM, IKU, IKK)

Sesuai dengan tugas pokok dan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh fungsi BPPKAD yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, maka BPPKAD telah menentukan Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja BPPKAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Table 2 - Tabel TC.23**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BPPKAD**

**KABUPATEN PROBOLINGGO**

| No | Indikator | Target NSPK | IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16( | (17) | (18) | (19) | (20) |
| **I** | **Indikator NSPK** | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II** | **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | | | | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 29 | 28 | 11% | 1<br>8.9 | 25.768<br>4 % | | | | | | | |
| 2 | Rasio PAD | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 00,00<br>75 | 1<br>119 | 11.188<br>3 % | | 14 % | | | | | |
| 3 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | | | | 19.35 | 19.35 | 19.35 | | | 57,16<br>% | 1<br>1.87 | 52.516<br>4 % | | 82 % | | | | | |
| 4 | Opini Laporan Keuangan | | | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | | | | |
| 5 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal) | | | | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | 93% | 88.74<br>% | -<br>223,49<br>4,555,3<br>13,682.<br>53 % | | 94% | | | | | |

| No | Indikator | Target NSPK | IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16( | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 6 | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal) | | | | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | 104,17% | 108,23% | -30,039,877,572,992.156 % | | 103% | | | | | |
| 7 | Assets Management: Aplikasi daftar asset tetap daftar asset tetap manual proses inventarisasi asset tahunan nilai asset tercantum dalam laporan anggaran | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya | | | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | 7,24% | 1 5.66 | 12.6701 % | | 7 | | | | | |
| 9 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | | | | 86.36 | 86.36 | 86.36 | | | | | 85.5330 % | | 92 | | | | | |
| 10 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 72.7273 % | | 100 | | | | | |
| III. | Indikator Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. | Target Renstra Perangkat Daerah | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator | Target NSPK | IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16( | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah | - | - | - | 65 OPD | 68 OPD | 60% | | | 67 OPD | 68 OPD | 87,5% | | | 100% | 103% | 103% | 100% | 145,83 % |
| 2 | Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | - | 40% | 65% | 75% | | | 59% | 65% | 75% | | | 170% | 148% | 150% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Kemandirian Keuangan Daerah | - | - | - | 10% | 2% | 13% | | | 10,1% | 4,90% | 11,37 % | | | 97,2% | 85% | 101% | 244% | 87% |

Pencapaian kinerja BPPKAD dinilai dari formula yang ditetapkan pada indikator kinerja utama (IKU) BPPKAD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja BPPKAD Kabupaten Probolinggo 2020–2024**

**1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

a. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Target meningkat dari 19,16% pada 2020 menjadi 19,30% pada 2024. Realisasi konsisten naik dari 11,25% (2020) menjadi 14,09% (2024). Rasio capaian menunjukkan tren positif dari 58% ke 73%, meski masih di bawah target. Hal ini menandakan efisiensi belanja pegawai semakin membaik.

b. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Target meningkat dari 17,33% (2020) ke 20,39% (2024). Realisasi tumbuh dari 11% (2020) ke 14% (2024), dengan rasio capaian sekitar 63–68%. Artinya kontribusi PAD masih perlu ditingkatkan agar kemandirian fiskal lebih kuat.

c. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum

Target menurun bertahap dari 79,75% (2020) ke 75% (2024). Realisasi konsisten di kisaran 76–78% sehingga rasio capaian sangat tinggi (98–102%). Ini menunjukkan efisiensi belanja umum terjaga.

d. Opini Laporan Keuangan

Target WTP tercapai 100% secara konsisten selama 2020–2024.

e. Deviasi Realisasi Belanja terhadap APBD

Target 96–100, realisasi 93,40–96,03. Rasio capaian stabil 95–97%, menandakan perencanaan dan realisasi belanja cukup kredibel.

f. Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran

Target 105–110, realisasi 106–114. Rasio capaian 100–103%, menunjukkan kinerja penerimaan daerah kredibel bahkan melebihi target.

g. Asset Management

Seluruh indikator (aplikasi aset, daftar aset manual, inventarisasi tahunan, pencantuman aset dalam laporan) konsisten 100%.

h. Rasio SILPA terhadap Belanja Tahun Sebelumnya

Target menurun 5% → 1% (2020–2024). Namun realisasi justru meningkat 4,5% → 3,2%. Rasio capaian membengkak hingga 320% pada 2024, menunjukkan persoalan serius dalam pengendalian SILPA.

i. Informasi Sumber Daya untuk Pelayanan

Target naik 96 → 100, realisasi meningkat dari 83 (2020) ke 95 (2024). Rasio capaian juga membaik dari 86% → 95%.

j. Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah

Seluruh target 100% tercapai setiap tahun.

**2. Target Renstra Perangkat Daerah**

a. Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja

   Target 20, realisasi konsisten 20 → capaian 100%.

b. Indeks Transparansi Keuangan Daerah

   Target naik 9 → 12,41. Realisasi hanya 7,18 → 7,76. Rasio capaian menurun dari 79% → 62%. Perlu perhatian khusus.

c. Indeks Penyerapan APBD

   Target naik 11 → 14,29. Realisasi naik 10 → 15,56. Rasio capaian fluktuatif, bahkan 108,86% di 2024.

d. Indeks Kemandirian Keuangan Daerah

   Target naik 11,20 → 12,50. Realisasi meningkat tajam, dari 11 → 19,10. Rasio capaian melonjak hingga 153% di 2024, menunjukkan kemandirian fiskal menguat signifikan.

e. Indeks Fleksibilitas Keuangan

   Target naik 2,04 → 2,10. Realisasi bahkan 2,21 di 2024. Rasio capaian 103–105%, menggambarkan ruang fiskal yang cukup baik.

f. Indeks Solvabilitas Layanan

   Target naik 1,8 juta → 2,1 juta. Realisasi melampaui target (2 juta → 2,24 juta). Rasio capaian konsisten tinggi (105–111%).

**KESIPULAN**

- Capaian sangat baik: Opini WTP, pengelolaan aset, kredibilitas PAD, akses informasi publik, fleksibilitas & solvabilitas layanan.
- Capaian cukup baik namun perlu ditingkatkan: Rasio belanja pegawai, kontribusi PAD, deviasi belanja.
- Capaian lemah: Transparansi keuangan daerah (hanya 62% di 2024), dan SILPA yang tinggi (320% di 2024).

## 2.3.2 Matrik anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan PD

**Table 3 - Tabel TC-24 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BPPKAD KABUPATEN PROBOLINGGO**

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **3.204.803.732,00** | | | | | **2.978.231.488,00** | | | | | **92,93%** | | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Pelayanan Administrasi Umum | 1.925.265.872 | | | | | 1.724.060.095,00 | | | | | 89,55% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pelayanan Managemen Kepegawaian | 1.006.785.500 | | | | | 984.033.073,00 | | | | | 97,74% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program | 272.752.360 | | | | | 270.138.320,00 | | | | | 99,04% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah** | **1.001.502.100** | | | | | **972.504.393,00** | | | | | **97,10%** | | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) | 117.803.760 | | | | | 117.180.648,00 | | | | | 99,47% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD | 77.043.800 | | | | | 77.043.800,00 | | | | | 100,00% | | | | | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Penyusunan Dokumen Pendukung dan Evaluasi APBD | 225.745.150 | | | | | 219.334.359,00 | | | | | 97,16% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD | 296.732.400 | | | | | 275.579.186,00 | | | | | 92,87% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD | 284.176.000 | | | | | 283.366.400,00 | | | | | 99,72% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Program Fasilitasi penatausahaan dan perbendaharaan keuangan pemerintah daerah** | **905.338.400** | | | | | **786.203.960,00** | | | | | **86,84%** | | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Penunjang administrasi perbendaharaan dan pengelolaan gaji PNS | 379.890.000 | | | | | 363.641.554,00 | | | | | 95,72% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penunjang Fungsi Bendahara Umum Daerah | 84.491.000 | | | | | 73.359.256,00 | | | | | 86,82% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaporan Dana Perimbangan | 74.821.000 | | | | | 36.951.500,00 | | | | | 49,39% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah | 65.356.400 | | | | | 41.076.650,00 | | | | | 62,85% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pendampingan dan Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA Keuangan) | 300.780.000 | | | | | 271.180.000,00 | | | | | 90,16% | | | | | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| **Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah** | **891.127.300** | | | | | **841.955.180,00** | | | | | **94,48%** | | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Rekonsiliasi data pendapatan daerah dan kas lainnya | 101.324.500 | | | | | 78.971.900,00 | | | | | 77,94% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pendampingan Entitas Akuntansi Pendapatan SKPD | 146.570.800 | | | | | 134.729.300,00 | | | | | 91,92% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Rekonsiliasi data belanja dan pembiayaan daerah | 180.318.000 | | | | | 180.034.600,00 | | | | | 99,84% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi dan Fasilitasi Forum Satuan Pengelola Keuangan SKPD | 50.261.000 | | | | | 49.289.780,00 | | | | | 98,07% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 173.625.500 | | | | | 173.248.500,00 | | | | | 99,78% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penyusunan Laporan Keuangan | 239.027.500 | | | | | 225.681.100,00 | | | | | 94,42% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pandapatan daerah** | **1.473.598.480** | | | | | **1.451.596.310,00** | | | | | **98,51%** | | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 160.722.660 | | | | | 154.545.160,00 | | | | | 96,16% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Monitoring dan Evaluasi Pajak daerah | 155.274.500 | | | | | 148.601.560,00 | | | | | 95,70% | | | | | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah | 350.723.000 | | | | | 348.583.666,00 | | | | | 99,39% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Optimalisasi Pendapatan Daerah | 569.150.720 | | | | | 566.942.924,00 | | | | | 99,61% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pelayanan Pajak Daerah | 237.727.600 | | | | | 232.923.000,00 | | | | | 97,98% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset dan Barang Milik Daerah** | **3.957.153.100** | | | | | **3.720.746.213,00** | | | | | **94,03%** | | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | 370.940.000 | | | | | 319.386.400,00 | | | | | 86,10% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pengamanan Aset dan Barang Milik Daerah | 2.656.272.400 | | | | | 2.487.763.310,00 | | | | | 93,66% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Inventarisasi Aset | 489.040.000 | | | | | 476.991.500,00 | | | | | 97,54% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penilaian, Penghapusan dan Penelusuran P3D | 340.660.700 | | | | | 338.297.400,00 | | | | | 99,31% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| Asuransi Bangunan Gedung dan Kendaraan | 100.240.000 | | | | | 98.807.603,00 | | | | | 98,57% | | | | | -20,00% | -20,00% |
| **2021** | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **123.152.010,00** | | | | | **122.346.100,00** | | | | | **99,35%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 65.498.000,00 | | | | | 65.305.400,00 | | | | | 99,71% | | | | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 25.214.010,00 | | | | | 24.701.500,00 | | | | | 97,97% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 32.440.000,00 | | | | | 32.339.200,00 | | | | | 99,69% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **26.465.296.208,00** | | | | | **22.196.863.372,00** | | | | | **83,87%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 26.465.296.208,00 | | | | | 22.196.863.372,00 | | | | | 83,87% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **308.793.500,00** | | | | | **280.239.244,00** | | | | | **90,75%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0,00% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 30.643.500,00 | | | | | 30.643.400,00 | | | | | 100,00% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | 60.445.100,00 | | | | | 60.426.620,00 | | | | | 99,97% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 25.800.000,00 | | | | | 25.800.000,00 | | | | | 100,00% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 44.554.900,00 | | | | | 41.994.224,00 | | | | | 94,25% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | 147.350.000,00 | | | | | 121.375.000,00 | | | | | 82,37% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **721.464.500,00** | | | | | **712.335.239,00** | | | | | **98,73%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 693.000,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00% | | | | -20,00% | 0,00% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 254.034.000,00 | | | | | 250.974.000,00 | | | | | 98,80% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 466.737.500,00 | | | | | 461.361.239,00 | | | | | 98,85% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **1.817.427.580,00** | | | | | **1.548.351.889,00** | | | | | **85,19%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 22.824.400,00 | | | | | 19.452.000,00 | | | | | 85,22% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 380.475.700,00 | | | | | 279.972.506,00 | | | | | 73,58% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 94.426.800,00 | | | | | 52.825.000,00 | | | | | 55,94% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 1.319.700.680,00 | | | | | 1.196.102.383,00 | | | | | 90,63% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **360.902.745,00** | | | | | **277.231.421,00** | | | | | **76,82%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 220.705.545,00 | | | | | 175.340.600,00 | | | | | 79,45% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | 93.200.000,00 | | | | | 65.940.821,00 | | | | | 70,75% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pemeliharaan Mebel | | 12.000.000,00 | | | | | 11.990.000,00 | | | | | 99,92% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 34.997.200,00 | | | | | 23.960.000,00 | | | | | 68,46% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | **1.153.885.800,00** | | | | | **968.054.475,00** | | | | | **83,90%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | 126.600.800,00 | | | | | 113.139.120,00 | | | | | 89,37% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | 163.322.000,00 | | | | | 163.142.462,00 | | | | | 99,89% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | **315.645.200,00** | | | | | **222.907.500,00** | | | | | 70,62% | | | | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | 325.317.800,00 | | | | | 317.315.950,00 | | | | | 97,54% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | 223.000.000,00 | | | | | 151.549.443,00 | | | | | 67,96% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | **921.105.000,00** | | | | | **876.662.323,00** | | | | | **95,18%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | 192.629.000,00 | | | | | 190.347.940,00 | | | | | 98,82% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | 44.278.000,00 | | | | | 43.907.285,00 | | | | | 99,16% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | | 322.848.000,00 | | | | | 320.810.000,00 | | | | | 99,37% | | | | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | 361.350.000,00 | | | | | 321.597.098,00 | | | | | 89,00% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | **1.092.608.550,00** | | | | | **946.619.257,00** | | | | | **86,64%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | 91.036.900,00 | | | | | 78.865.000,00 | | | | | 86,63% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | 150.149.600,00 | | | | | 140.424.200,00 | | | | | 93,52% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | 80.353.000,00 | | | | | 74.091.387,00 | | | | | 92,21% | | | | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran | | 472.229.250,00 | | | | | 419.176.300,00 | | | | | 88,77% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | 134.875.000,00 | | | | | 113.187.600,00 | | | | | 83,92% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | 163.964.800,00 | | | | | 120.874.770,00 | | | | | 73,72% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | **2.645.362,00** | | | | | **2.645.361,00** | | | | | **100,00 %** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | | 2.645.362,00 | | | | | 2.645.361,00 | | | | | 100,00 % | | | | -20,00% | -20,00% |
| Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0,00% |
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0,00% |
| Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | **4.643.406.120,00** | | | | | **3.069.528.038,00** | | | | | **66,11%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Inventarisasi Barang Milik Daerah | | 391.759.900,00 | | | | | 385.202.000,00 | | | | | 98,33% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | | 3.470.570.620,00 | | | | | 1.929.216.088,00 | | | | | 55,59% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | 447.095.600,00 | | | | | 439.256.200,00 | | | | | 98,25% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | 333.980.000,00 | | | | | 315.853.750,00 | | | | | 94,57% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | | **2.752.786.000,00** | | | | | **2.741.238.558,00** | | | | | **99,58%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Penetapan Wajib Pajak Daerah | | 1.437.000.000,00 | | | | | 1.431.680.034,00 | | | | | 99,63% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penagihan Pajak Daerah | | 733.226.000,00 | | | | | 727.269.524,00 | | | | | 99,19% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | 582.560.000,00 | | | | | 582.289.000,00 | | | | | 99,95% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **727.117.500,00** | | | | | **670.884.500,00** | | | | | **92,27%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Pengadaan Mebel | | 199.362.000,00 | | | | | 191.566.100,00 | | | | | 96,09% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 341.388.000,00 | | | | | 311.140.500,00 | | | | | 91,14% | | | | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 49.290.000,00 | | | | | 48.345.000,00 | | | | | 98,08% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 137.077.500,00 | | | | | 119.832.900,00 | | | | | 87,42% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **15.000.000,00** | | | | | **13.637.000,00** | | | | | **90,91%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | 15.000.000,00 | | | | | 13.637.000,00 | | | | | 90,91% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00%** | | | | **0,00%** | **0,00%** |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0,00% |
| **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | **100.000.000,00** | | | | | **98.467.000,00** | | | | | **98,47%** | | | | **-20,00%** | **-20,00%** |
| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | 100.000.000,00 | | | | | 98.467.000,00 | | | | | 98,47% | | | | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | **100.000.000,00** | | | | | **92.405.500,00** | | | | | 92,41% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran | | 100.000.000,00 | | | | | 92.405.500,00 | | | | | 92,41% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | 63.750.000,00 | | | | | 61.860.000,00 | | | | | 97,04% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | | 43.750.000,00 | | | | | 43.750.000,00 | | | | | 100,00% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | 20.000.000,00 | | | | | 18.110.000,00 | | | | | 90,55% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | | **160.000.000,00** | | | | | **156.973.659,00** | | | | | **98,11%** | | | | -20,00% | -20,00% |
| Penetapan Wajib Pajak Daerah | | 65.000.000,00 | | | | | 62.978.659,00 | | | | | 96,89% | | | | -20,00% | -20,00% |
| Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | **95.000.000,00** | | | | | **93.995.000,00** | | | | | 98,94% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | 42.677.500.945,00 | | | | | 27.821.539.655,00 | | | | | 65,19% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak** | | 42.677.500.945,00 | | | | | 27.821.539.655,00 | | | | | 65,19% | | | | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| **Non Kegiatan (Belanja Bantuan Keuangan)** | | 0,00 | | | | | 429.195.411.929,00 | | | | | 0,00% | | | | 0,00% | -20,00% |
| **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | 583.167.646.000,00 | | | | | 151.122.234.000,00 | | | | | 25,91% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan** | | 575.331.502.000,00 | | | | | 143.286.090.000,00 | | | | | 24,90% | | | | -20,00% | -20,00% |
| **Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota** | | 7.836.144.000,00 | | | | | 7.836.144.000,00 | | | | | 100,00 % | | | | -20,00% | -20,00% |
| **2022 - 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAREAH KABUPATEN/KOTA** | | | **32.080.564.714,00** | **20.307.626.717,00** | **27.094.654.379,00** | | | **23.160.327.314,00** | **17.834.189.217,00** | **20.330.149.954,00** | | | 72,19% | 87,82% | 75,03% | -20,66% | -21,80% |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | **460.363.600,00** | **177.165.697,00** | **485.788.798,00** | | | **447.679.563,00** | **155.509.691,00** | **440.300.306,00** | | | 97,24% | 87,78% | 90,64% | 2,54% | 3,57% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 256.800.000,00 | 127.765.697,00 | 430.956.898,00 | | | 251.850.551,00 | 114.567.756,00 | 399.359.486,00 | | | 98,07% | 89,67% | 92,67% | 17,41% | 18,81% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | | | 26.253.800,00 | 24.200.000,00 | 33.391.900,00 | | | 25.201.700,00 | 21.626.695,00 | 20.075.920,00 | | | 95,99% | 89,37% | 60,12% | -13,97% | -24,27% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | | | 107.324.079,00 | 0,00 | 0,00 | | | 104.743.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 97,60% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD | | | 10.281.221,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.103.312,00 | 0,00 | 0,00 | | | 98,27% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Koordinasi dan Penvusunan Perubahan DPA-SKPD | | | 21.604.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19.813.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 91,71% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 30.000.000,00 | 25.200.000,00 | 21.440.000,00 | | | 28.775.000,00 | 19.315.240,00 | 20.864.900,00 | | | 95,92% | 76,65% | 97,32% | -26,18% | -24,97% |
| Evaluasi Kineria Perangkat Daerah | | | 8.100.000,00 | **0,00** | 0,00 | | | 7.192.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 88,79% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | **14.937.266.070,00** | **12.511.253.677,00** | **16.645.616.059,00** | | | **10.483.099.516,00** | **10.659.288.427,00** | **11.918.127.807,00** | | | 70,18% | 85,20% | 71,60% | -16,64% | -17,30% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 14.937.266.070,00 | 12.511.253.677,00 | 16.645.616.059,00 | | | 10.483.099.516,00 | 10.659.288.427,00 | 11.918.127.807,00 | | | 70,18% | 85,20% | 71,60% | -16,64% | -17,30% |
| **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | **4.800.000,00** | **0,00** | 0,00 | | | **4.212.000,00** | **0,00** | 0,00 | | | 87,75% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 87,75% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | **128.612.200,00** | **282.852.000,00** | **614.207.000,00** | | | **120.047.398,00** | **263.008.580,00** | **450.199.656,00** | | | 93,34% | 92,98% | 73,30% | 27,41% | 18,05% |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 0,00 | 0,00 | 46.555.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 38.640.000,00 | | | 0,00% | 0,00% | 83,00% | -20,00% | -20,00% |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 128.612.200,00 | 282.852.000,00 | 567.652.000,00 | | | 120.047.398,00 | 263.008.580,00 | 411.559.656,00 | | | 93,34% | 92,98% | 72,50% | 24,12% | 15,11% |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **993.773.100,00** | **913.697.777,00** | **1.066.621.300,00** | | | **922.835.590,00** | **841.350.961,00** | **595.819.721,00** | | | 92,86% | 92,08% | 55,86% | -18,26% | -27,60% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 15.575.400,00 | 2.750.000,00 | 3.383.000,00 | | | 1.982.500,00 | 0,00 | 379.500,00 | | | 12,73% | 0,00% | 11,22% | -31,87% | -40,00% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 86.002.800,00 | 135.954.513,00 | 115.014.800,00 | | | 65.780.000,00 | 115.578.030,00 | 74.813.750,00 | | | 76,49% | 85,01% | 65,05% | -11,46% | -11,91% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 20.086.500,00 | 0,00 | 20.332.000,00 | | | 20.086.500,00 | 0,00 | 18.826.000,00 | | | ###### | 0,00% | 92,59% | -40,00% | -40,00% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 42.800.200,00 | 43.917.700,00 | 43.900.000,00 | | | 42.795.900,00 | 43.880.000,00 | 38.308.500,00 | | | 99,99% | 99,91% | 87,26% | -19,49% | -22,03% |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 150.000.000,00 | 167.996.164,00 | 196.499.300,00 | | | 149.993.350,00 | 152.880.750,00 | 134.887.638,00 | | | ###### | 91,00% | 68,65% | -14,21% | -21,97% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 85.550.000,00 | 66.639.117,00 | 57.980.000,00 | | | 65.920.000,00 | 63.566.000,00 | 42.310.000,00 | | | 77,05% | 95,39% | 72,97% | -27,02% | -27,40% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SK.PD | | | 352.652.200,00 | 248.745.283,00 | 595.252.200,00 | | | 338.782.785,00 | 236.751.181,00 | 252.034.333,00 | | | 96,07% | 95,18% | 42,34% | 1,97% | -24,73% |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | | | 99.234.555,00 | 136.350.000,00 | 0,00 | | | 99,23% | 90,90% | 0,00% | -10,00% | -12,52% |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 141.106.000,00 | 97.695.000,00 | 34.260.000,00 | | | 138.260.000,00 | 92.345.000,00 | 4.260.000,00 | | | 97,98% | 94,52% | 12,43% | -39,14% | -45,72% |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | **13.148.420.000,00** | **2.671.521.500,00** | **4.371.313.570,00** | | | **9.160.879.743,00** | **2.645.475.000,00** | **3.965.831.550,00** | | | 69,67% | 99,03% | 90,72% | -23,21% | -24,24% |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 12.551.950.000,00 | 2.349.274.000,00 | 1.976.201.000,00 | | | 8.734.688.880,00 | 2.339.000.000,00 | 1.835.588.080,00 | | | 69,59% | 99,56% | 92,88% | -39,43% | -38,95% |
| Pengadaan Mebel | | | 97.644.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 92.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 94,69% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnva | | | 481.701.000,00 | 322.247.500,00 | 918.297.100,00 | | | 323.959.863,00 | 306.475.000,00 | 758.059.100,00 | | | 67,25% | 95,11% | 82,55% | 10,37% | 8,39% |
| Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | 11.511.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 84,86% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 5.614.000,00 | 0,00 | 1.476.815.470,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1.372.184.370,00 | | | 0,00% | 0,00% | 92,92% | -40,00% | -20,00% |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **1.840.640.844,00** | **3.195.584.366,00** | **3.114.716.552,00** | | | **1.711.671.534,00** | **2.839.852.183,00** | **2.290.729.988,00** | | | 92,99% | 88,87% | 73,55% | -5,78% | -10,69% |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 45.000.000,00 | 39.231.000,00 | 13.780.000,00 | | | 35.442.000,00 | 32.821.000,00 | 10.860.000,00 | | | 78,76% | 83,66% | 78,81% | -35,54% | -34,86% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 400.727.812,00 | 197.182.000,00 | 28.200.000,00 | | | 293.750.636,00 | 145.232.841,00 | 23.441.280,00 | | | 73,30% | 73,65% | 83,13% | -47,30% | -46,88% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.394.913.032,00 | 2.959.171.366,00 | 3.072.736.552,00 | | | 1.382.478.898,00 | 2.661.798.342,00 | 2.256.428.708,00 | | | 99,11% | 89,95% | 73,43% | 3,20% | -4,54% |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **566.688.900,00** | **555.551.700,00** | **796.391.100,00** | | | **309.901.970,00** | **429.704.375,00** | **669.140.926,00** | | | 54,69% | 77,35% | 84,02% | -11,72% | -1,12% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 131.600.000,00 | 453.428.000,00 | 371.820.000,00 | | | I 10.806.352,00 | 366.871.625,00 | 334.643.137,00 | | | 0,00% | 80,91% | 90,00% | 25,31% | -21,76% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 217.932.000,00 | 33.300.000,00 | 212.000.000,00 | | | 134.070.618,00 | 22.701.000,00 | 193.612.200,00 | | | 61,52% | 68,17% | 91,33% | 70,38% | 113,96% |
| Pemeliharaan Mebel | | | 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | 0,00% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 194.931.100,00 | 68.823.700,00 | 157.571.100,00 | | | 45.045.000,00 | 40.131.750,00 | 89.275.450,00 | | | 23,11% | 58,31% | 56,66% | -7,15% | 2,31% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 20.205.800,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | | | 19.980.000,00 | 0,00 | 51.610.139,00 | | | 98,88% | 0,00% | 93,84% | -40,00% | -40,00% |
| **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | **621.450.520.688,00** | **586.450.448.659,00** | **542.684.532.694,00** | | | **603.311.616.979,00** | 0,00 | **535.667.351.074,00** | | | **97,08%** | **0,00%** | **98,71%** | **-22,62%** | **-40,00%** |
| **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | **950.159.800,00** | **736.944.708,00** | **1.169.143.694,00** | | | **857.172.102,00** | **682.337.551,00** | **1.044.478.340,00** | | | **90,21%** | **92,59%** | **89,34%** | **-12,76%** | **-13,46%** |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | 124.242.000,00 | 137.367.500,00 | 216.911.350,00 | | | 110.715.900,00 | 123.130.050,00 | 196.875.739,00 | | | 89,11% | 89,64% | 90,76% | -6,31% | -5,78% |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | 137.356.000,00 | 116.958.341,00 | 190.142.144,00 | | | 118.300.200,00 | 105.475.200,00 | 182.518.647,00 | | | 86,13% | 90,18% | 95,99% | -10,46% | -7,56% |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | 17.912.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.812.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 60,36% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | 8.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.512.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 91,48% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | 7.041.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.041.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | ###### | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | 8.812.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8.812.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | ###### | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | 166.848.800,00 | 152.309.240,00 | 302.407.100,00 | | | 161 160.800,00 | 137.532.745,00 | 285.094.405,00 | | | 0,00% | 90,30% | 94,28% | -2,03% | 1,46% |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | 241.701.200,00 | 164.025.327,00 | 181.408.000,00 | | | 227.314.322,00 | 158.852.000,00 | 162.771.500,00 | | | 94,05% | 96,85% | 89,73% | -24,31% | -25,53% |
| Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | 193.900.000,00 | 166.284.300,00 | 278.275.100,00 | | | 181.411.780,00 | 157.347.556,00 | 217.218.049,00 | | | 93,56% | 94,63% | 78,06% | -9,38% | -15,04% |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | 6.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 88,67% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | 9.414.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.500.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 69,05% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.976.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 98,80% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 26.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 37,34% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | | **987.446.000,00** | **608.500.997,00** | **955.286.000,00** | | | **933.350.228,00** | **601.346.794,00** | **945.852.782,00** | | | 94,52% | 98,82% | 99,01% | -16,28% | -15,66% |
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | 110.000.000,00 | 75.518.497,00 | 46.265.000,00 | | | 107.505.200,00 | 75.022.300,00 | 45.117.761,00 | | | 97,73% | 99,34% | 97,52% | -34,02% | -34,02% |
| Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | 30.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.452.800,00 | | | 29.793.000,00 | 10.442.200,00 | 10.017.900,00 | | | 99,31% | 99,45% | 95,84% | -33,09% | -33,80% |
| Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | 397.924.000,00 | 327.338.000,00 | 135.618.400,00 | | | 377.572.5I9,00 | 322.987.377,00 | 134.214.020,00 | | | 0,00% | 98,67% | 98,96% | -35,26% | -31,69% |
| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | 369.922.000,00 | 195.144.500,00 | 361.935.000,00 | | | 353.084.507 ,00 | 192.894.917,00 | 360.223.085,00 | | | 0,00% | 98,85% | 99,53% | -12,36% | -2,65% |
| Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 79.600.000,00 | 0,00 | 316.493.000,00 | | | 65.395.002,00 | 0,00 | 314.424.853,00 | | | 82,15% | 0,00% | 99,35% | -40,00% | -40,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | 0,00 | 0,00 | 34.975.600,00 | | | | 0,00 | 32.648.559,00 | | | 0,00% | 0,00% | 93,35% | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Cadangan Dan Dana Transfer Lainnya | | | 0,00 | 0,00 | 41.940.000,00 | | | | 0,00 | 41.723.004,00 | | | 0,00% | 0,00% | 99,48% | -20,00% | -20,00% |
| Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | 0,00 | 0,00 | 7.606.200,00 | | | | 0,00 | 7.483.600,00 | | | 0,00% | 0,00% | 98,39% | -20,00% | -20,00% |
| **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | **947.471.100,00** | **749.315.329,00** | **1.000.694.000,00** | | | **916.168.078,00** | **729.913.481,00** | **883.124.059,00** | | | **96,70%** | **97,41%** | **88,25%** | **-17,47%** | **-19,87%** |
| Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | 85.720.000,00 | 302.751.229,00 | 166.810.000,00 | | | 81.796.900,00 | 299.331.533,00 | 158.485.000,00 | | | 0,00% | 98,87% | 95,01% | -28,98% | 23,78% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | 64.114.800,00 | 42.129.100,00 | 245.353.500,00 | | | 62.219.800,00 | 37.089.247,00 | 223.273.500,00 | | | 97,04% | 88,04% | 91,00% | 69,62% | 72,32% |
| Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 169.627.500,00 | 111.290.150,00 | 301.177.500,00 | | | 168.064.000,00 | 108.312.540,00 | 217.208.943,00 | | | 99,08% | 97,32% | 72,12% | 7,25% | -7,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | 372.418.200,00 | 293.144.850,00 | 287.353.000,00 | | | 362.332.536,00 | 285.180.161,00 | 284.156.616,00 | | | 97,29% | 97,28% | 98,89% | -24,65% | -24,33% |
| Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | 147.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 142.524.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 96,56% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | 34.992.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 27.912.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 79,77% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 37.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 37.979.544,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99,95% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 33.338.698,00 | 0,00 | 0,00 | | | 95,25% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | **618.565.443.788,00** | **584.355.687.625,00** | **539.559.409.000,00** | | | **600.604.926.571,00** | **532.031.615.123,00** | **532.793.895.893,00** | | | **97,10%** | **91,05%** | **98,75%** | **-22,64%** | **-22,25%** |
| Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | 576.376.598.000,00 | 518.503.379.000,00 | 522.163.256.000,00 | | | 575.505.476.600,00 | 517.373.919.001,00 | 519.343.256.000,00 | | | 99,85% | 99,78% | 99,46% | -21,87% | -21,94% |
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | 33.380.354.788,00 | 56.577.571.625,00 | 6.027.461.000,00 | | | 16.310.958.971,00 | 5.382.959.122,00 | 2.081.957.893,00 | | | 48,86% | 9,51% | 34,54% | -23,97% | -45,66% |
| Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | 8.808.491.000,00 | 9.274.737.000,00 | 11.368.692.000,00 | | | 8.788.491.000,00 | 9.274.737.000,00 | 11.368.682.000,00 | | | 99,77% | 100,00% | 100,00% | -14,43% | -14,38% |
| **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | **3.125.000.000,00** | **2.565.654.713,00** | **3.005.699.600,00** | | | **3.029.323.691,00** | **2.434.370.101,00** | **2.675.206.367,00** | | | **96,94%** | **94,88%** | **89,00%** | -20,15% | -21,95% |
| **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | **3.125.000.000,00** | **2.565.654.713,00** | **3.005.699.600,00** | | | **3.029.323.691,00** | **2.434.370.101,00** | **2.675.206.367,00** | | | **96,94%** | **94,88%** | **89,00%** | -20,15% | -21,95% |
| Penyusunan Standar Harga | | | 119.200.000,00 | 129.250.000,00 | 110.060.000,00 | | | 116.827.500,00 | 122.557.500,00 | 108.794.500,00 | | | 98,01% | 94,82% | 98,85% | -21,28% | -21,27% |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | 57.636.000,00 | 46.465.500,00 | 32.065.000,00 | | | 53.151.800,00 | 43.290.000,00 | 28.390.000,00 | | | 92,22% | 93,17% | 88,54% | -30,07% | -30,59% |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | 626.389.000,00 | 576.237.213,00 | 652.467.500,00 | | | 603.876.081 ,00 | 539.248.692,00 | 608.160.760,00 | | | 0,00% | 93,58% | 93,21% | -18,96% | -17,44% |
| Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | 101.775.000,00 | 33.582.000,00 | 91.310.000,00 | | | 100.572.100,00 | 27.565.000,00 | 70.745.000,00 | | | 98,82% | 82,08% | 77,48% | 0,98% | -3,19% |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | | | 1.840.000.000,00 | 1.213.709.600,00 | 1.350.287.000,00 | | | 1.789.929.760,00 | 1.161.649.183,00 | 1.151.774.336,00 | | | 97,28% | 95,71% | 85,30% | -24,56% | -27,19% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Penilaian Barang Milik Daerah | | | 220.000.000,00 | 439.855.400,00 | 529.430.100,00 | | | 216.018.950,00 | 427.119.050,00 | 499.201.800,00 | | | 98,19% | 97,10% | 94,29% | 4,06% | 2,92% |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | 110.000.000,00 | 126.555.000,00 | 240.080.000,00 | | | 104.757.500,00 | 112.940.676,00 | 208.139.971,00 | | | 95,23% | 89,24% | 86,70% | 0,95% | -1,58% |
| Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 44.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 88,38% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | **2.165.000.000,00** | **2.233.783.804,00** | **2.583.365.501,00** | | | **2.053.249.490,00** | **1.687.047.132,00** | **2.252.083.373,00** | | | **94,84%** | **75,52%** | **87,18%** | -16,23% | -16,87% |
| **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | | | **2.165.000.000,00** | **2.233.783.804,00** | **2.583.365.501,00** | | | **2.053.249.490,00** | **1.687.047.132,00** | **2.252.083.373,00** | | | **94,84%** | **75,52%** | **87,18%** | -16,23% | -16,87% |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiiakan Pajak Daerah | | | 149.472.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 146.854.250,00 | 0,00 | 0,00 | | | 98,25% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | 276.000.000,00 | 396.900.000,00 | 425.548.000,00 | | | 267.122.710,00 | 285.842.330,00 | 399.477.100,00 | | | 96,78% | 72,02% | 93,87% | -9,80% | -10,65% |
| Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Paiak Daerah | | | 305.000.000,00 | 300.000.000,00 | 340.144.190,00 | | | 289.549.041,00 | 220.184.868,00 | 311.190.701,00 | | | 94,93% | 73,39% | 91,49% | -17,65% | -16,52% |
| Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | 145.000.000,00 | 66.954.311,00 | | | | 106.340.000,00 | 61.047.950,00 | | | 0,00% | 73,34% | 91,18% | -30,76% | -28,52% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | 345.000.000,00 | 560.000.000,00 | 399.630.000,00 | | | 328.815.500,00 | 407.122.398,00 | 376.374.300,00 | | | 95,31% | 72,70% | 94,18% | -13,26% | -16,75% |
| Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 33.093.500,00 | | | 24.220.000,00 | 22.630.000,00 | 27.775.000,00 | | | 96,88% | 90,52% | 83,93% | -13,53% | -16,77% |
| Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Paiak Daerah | | | 75.000.000,00 | 100.000.000,00 | 94.891.000,00 | | | 73.513.000,00 | 66.033.000,00 | 78.089.696,00 | | | 98,02% | 66,03% | 82,29% | -14,36% | -18,38% |
| Penagihan Pajak Daerah | | | 735.000.000,00 | 586.883.804,00 | 1.057.889.500,00 | | | 701.373.289,00 | 536.043.036,00 | 924.942.127,00 | | | 95,42% | 91,34% | 87,43% | -7,98% | -10,20% |
| Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | 165.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 161.154.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 97,67% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | -20,00% |
| Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | 89.527.600,00 | 120.000.000,00 | 165.215.000,00 | | | 60.647.700,00 | 42.851.500,00 | 73.186.499,00 | | | 67,74% | 35,71% | 44,30% | -5,66% | -11,71% |

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN BPPKAD KABUPATEN PROBOLINGGO**

1. Tahun 2020

Pada tahun 2020, BPPKAD melaksanakan berbagai program pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, penggalian PAD, serta pengelolaan aset daerah. Secara umum, tingkat realisasi terhadap anggaran sangat tinggi (86–100%), dengan beberapa kegiatan bahkan mencapai 100% realisasi (misalnya penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD dan penyusunan peraturan pertanggungjawaban APBD).

Namun, terdapat beberapa program dengan realisasi rendah, seperti Koordinasi Dana Perimbangan (49,39%) dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah (62,85%). Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada tahun ini tercatat negatif (sekitar –20%), yang dipengaruhi oleh efisiensi belanja dan refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19.

2. Tahun 2021

Pada tahun ini, belanja administrasi keuangan perangkat daerah mendominasi dengan porsi terbesar melalui penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Rasio realisasi terhadap anggaran berkisar 83–100%, cukup stabil meskipun ada tekanan efisiensi.

Beberapa sub-kegiatan menunjukkan realisasi rendah, seperti dukungan pelaksanaan SPBE (82,37%) dan penyediaan jasa komunikas /listrik (73,58%). Namun, indikator penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan logistik kantor, hingga pengadaan barang cetakan tetap tinggi (99–100%).

3. Tahun 2022

Pada periode ini mulai terlihat adanya fluktuasi besar dalam alokasi anggaran. Program penunjang urusan pemerintahan daerah mengalami realisasi sekitar 72–87%, dengan beberapa kegiatan nol realisasi (misalnya dokumen perubahan RKA-SKPD).

Sementara itu, program pengelolaan keuangan daerah tetap dominan dengan nilai anggaran ratusan miliar, dan rasio realisasi rata-rata tinggi (90–98%). Namun, terdapat juga kegiatan dengan penyerapan sangat rendah, terutama di sub-program administrasi umum dan pemeliharaan aset.

4. Tahun 2023

Tahun 2023 menunjukkan pola yang hampir sama, di mana program besar seperti pengelolaan keuangan daerah dan penyaluran bantuan keuangan tetap mendominasi. Realisasi cukup tinggi (85–99%), meski beberapa kegiatan administrasi umum hanya mencapai 55–73%.

Program pengelolaan barang milik daerah mencapai realisasi 89–97%,

menunjukkan adanya konsistensi dalam inventarisasi, pengamanan, dan optimalisasi aset.

5. Tahun 2024

Memasuki 2024, secara umum realisasi tetap tinggi pada kegiatan utama (90–99%), namun terdapat beberapa penurunan drastis pada sub-kegiatan administrasi umum (misalnya penyediaan peralatan rumah tangga, cetakan, rapat koordinasi, dan dukungan SPBE) yang hanya mencapai 40–70%.

Program pengelolaan pendapatan daerah terealisasi 75–87%, lebih rendah dari target awal. Hal ini menandakan tantangan dalam pencapaian target PAD dan efektivitas ekstensifikasi pajak/retribusi daerah.

**Kesimpulan Utama**

1. Kinerja Realisasi Anggaran Tinggi mayoritas program dan sub-kegiatan konsisten terealisasi di atas 85–95%, khususnya program inti (penyusunan APBD, akuntansi, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset).
2. Variasi Rendah pada Sub-Kegiatan beberapa sub-program kecil (dukungan SPBE, jasa komunikasi/listrik, pemeliharaan peralatan kantor) sering tidak optimal dengan realisasi di bawah 75%.
3. Dominasi Belanja Pegawai & Keuangan alokasi terbesar tetap untuk belanja pegawai, perbendaharaan, dan penyaluran bantuan keuangan.
4. Tantangan 2022–2024 efisiensi anggaran, refocusing, serta penurunan pada beberapa indikator pelayanan umum dan PAD menyebabkan gap antara anggaran dan realisasi.

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja BPPKAD dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

### 2.4.1 Peluang-Peluang Strategis BPPKAD Ke Depan

**1) Digitalisasi dan Sistem Informasi Keuangan Daerah**

- Pemanfaatan aplikasi keuangan berbasis elektronik (SIPD, e-Budgeting, e-Planning, e-SAKIP, e-Aset).
- Pengembangan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online (QRIS, mobile banking, marketplace).
- Peluang meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi data keuangan dengan teknologi digital.

2) **Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
   - Ekstensifikasi sumber PAD baru melalui regulasi pajak dan retribusi daerah sesuai UU HKPD No. 1/2022.
   - Intensifikasi pemungutan pajak dengan basis data digital, integrasi NIK–NPWP–NIB.
   - Pemanfaatan aset daerah yang idle menjadi sumber PAD alternatif (sewa, kerja sama, investasi daerah).
3) **Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah**
   - Peluang mempertahankan atau meningkatkan opini WTP dari BPK.
   - Meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) melalui manajemen yang transparan dan akuntabel.
   - Peluang memperkuat peran BPPKAD sebagai motor pengendalian fiskal daerah.
4) **Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)**
   - Optimalisasi aset daerah untuk kegiatan produktif (kerja sama pemanfaatan, KSP, sewa, BOT, dll.).
   - Transformasi manajemen aset berbasis teknologi (SIMBADA/SIADK) untuk menekan kehilangan/idle assets.
   - Peluang menjadikan aset daerah sebagai jaminan investasi atau leverage dalam kerjasama PPP (Public Private Partnership).
5) **Kebijakan Nasional dan Dukungan Pusat**
   - Implementasi UU HKPD membuka peluang fleksibilitas fiskal baru, misalnya pajak opsen kendaraan bermotor.
   - Dukungan transfer ke daerah yang berbasis kinerja (DAK berbasis output/outcome, DID, insentif fiskal).
   - Kesempatan mengakses program hibah atau bantuan keuangan dari pusat/provinsi.
6) **Sinergi dengan Pemerintah Desa dan OPD**
   - Peluang memperkuat pembinaan dan pengawasan keuangan desa melalui sistem akuntabilitas yang lebih baik.
   - Sinkronisasi program lintas perangkat daerah untuk memperkuat belanja pembangunan.
7) **Partisipasi Publik dan Transparansi**
   - Pemanfaatan keterbukaan informasi publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak daerah.
   - Peluang kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan dan pemanfaatan aset daerah.

### 2.4.2 Tantangan BPPKAD ke Depan

1) **Keterbatasan Fiskal Daerah**
   - PAD masih rendah di sebagian besar kabupaten/kota (umumnya <20% dari total pendapatan).
   - Ketergantungan tinggi pada transfer pusat (DAU, DAK, DBH).
   - Sulit menambah ruang fiskal karena sebagian besar belanja terserap untuk belanja pegawai dan belanja wajib lainnya.
2) **Efisiensi dan Penyerapan Anggaran**
   - Tantangan menjaga penyerapan anggaran minimal 90–95% setiap tahun.
   - Potensi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang tinggi bila perencanaan dan pelaksanaan tidak sinkron.
   - Resiko keterlambatan kegiatan karena proses administrasi panjang.
3) **Optimalisasi Aset Daerah**
   - Banyak aset daerah idle, tidak produktif, atau bermasalah secara hukum (status kepemilikan belum jelas).
   - Lemahnya database aset (SIMBADA) sehingga rawan salah kelola.
   - Tantangan mengubah aset pasif menjadi aset produktif yang menghasilkan PAD.
4) **Digitalisasi dan Transformasi Teknologi**
   - Implementasi SIPD, e-Budgeting, e-Planning, e-Aset masih menghadapi kendala SDM dan infrastruktur IT.
   - Perlu integrasi data keuangan daerah dengan data kependudukan, pajak pusat, dan perbankan.
   - Ancaman keamanan data (cyber security).
5) **Kepatuhan dan Akuntabilitas**
   - Menjaga opini WTP BPK secara konsisten setiap tahun.
   - Risiko temuan audit (ketidakpatuhan, kelemahan sistem, kerugian daerah).
   - Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan laporan keuangan dan aset.
6) **Implementasi Regulasi Baru (UU HKPD No. 1/2022)**
   - Perubahan klasifikasi pajak/retribusi yang menuntut penyesuaian sistem pemungutan.
   - Penghapusan/penyederhanaan beberapa jenis retribusi bisa menurunkan PAD.
   - Harus berinovasi dalam menggali sumber PAD baru sesuai regulasi.

**7) Partisipasi Publik dan Kepatuhan Pajak**

- Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah masih rendah (pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, dll.).
- Tantangan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pajak daerah kembali dalam bentuk layanan publik.

**8) Koordinasi Lintas OPD dan Desa**

- BPPKAD sering bergantung pada ketepatan laporan SKPD untuk rekonsiliasi dan konsolidasi LKPD.
- Keterlambatan laporan dari perangkat daerah bisa menghambat penyusunan laporan keuangan.
- Sinkronisasi dengan pemerintah desa terkait transfer keuangan dan akuntabilitas dana desa.

**9) Kemandirian Daerah**

- Tantangan besar meningkatkan rasio kemandirian fiskal (PAD ÷ Total Pendapatan) dari level 10–20% ke >25%.
- Perlu inovasi layanan dan strategi penggalian PAD tanpa menambah beban berlebihan pada masyarakat.

## 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

BPPKAD memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BPPKAD, maka Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan. BPPKAD Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Pengelolaan Keuangan Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, BPPKAD Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPPKAD Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan BPPKAD Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Table 4 - Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah**

| No. | Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan keuangan daerah yang belum memadai. | Penganggaran keuangan daerah yang belum optimal | 1. Masih terjadi kesalahan kode rekening dalam penganggaran<br>2. Masih terjadi kesalahan penempatan rencana anggaran kas |
| | | Kurangnya akuntabilitas pengelolaan belanja dan pendapatan | 1. Belum seluruh transaksi belanja dan pendapatan di laksanakan secara eletronifikasi<br>2. Kurang optimalnya penyerapan anggaran |
| | | Penyusunan laporan keuangan belum memadai | 1. Kurangnya Pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP<br>2. Terbatasnya SDM disiplin ilmu akuntansi |
| | ➢ Peningkatan Akuntabilitas dan reformasi birokrasi belum sesuai dengan harapan<br>➢ Kinerja penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah belum optimal<br>➢ Kualitas pelayanan belum optimal | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ➢ Keterbatasan kemandirian keuangan daerah (keterbatasan Penghasilan Asli Daerah), khususnya dalam membiayai pembangunan | | |
| 2 | Belum Optimalnya PAD | Kurangnya koordinasi dan sinergi kinerja dan data dengan OPD terkait | 1. Belum seluruh potensi pendapatan terdata dan tertagih<br>2. Belum seluruh transaksi PAD menggunakan elektronisasi<br>3. Lemahnya pengawasan dan penegakan perda pajak dan retribusi |
| 3 | Pengelolaan BMD yang belum memadai | Belum optimalnya pemanfaatan BMD | 1. Kurangnya komitmen OPD dalam pemanfaatan BMD<br>2. Kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan BMD |

## 2.6 Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Program RPJMD Kab Probolinggo

Visi pembangunan daerah merupakan gambaran kondisi Kabupaten Probolinggo yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam jangka lima tahun ke depan. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah: **"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing"**

Visi Kabupaten Probolinggo menjadi dasar yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025-2029. Penjabaran dari visi tersebut akan dijelaskan melalui tabel berikut ini:

**Table 5 - Penjelasan Pokok-pokok Visi**

| Visi | Pokok-pokok Visi | Penjelasan Visi |
|---|---|---|
| **Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing** | Sejahtera | Keadaan dimana terwujud pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dimana pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo ditandai dengan terwujudnya individu-individu masyarakat yang sejahtera baik secara sosial maupun ekonomi, dalam lingkungan sosial yang kondusif bagi pembangunan. Secara eksplisit, makna "sejahtera" merujuk pada Kabupaten Probolinggo yang "SAE" (baik), baik dari segi kualitas sumber daya manusianya, khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan (SAE Pendidikan dan Kesehatan) maupun aspek ketahanan sosialnya (SAE Sosial). |
| | Amanah-Religius | Keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Probolinggo mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas tinggi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai anti-korupsi sehingga menjadi pemerintah yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah daerah juga mampu menyelenggarakan pembangunan secara efektif melalui kolaborasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan sehingga terwujud pemerintahan yang SAE (baik) |

| Visi | Pokok-pokok Visi | Penjelasan Visi |
|---|---|---|
| | Eksis-Berdaya Saing | Keadaan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan lingkungan sosial yang sehat dengan budaya yang maju.<br>Menggunakan cara-cara baru dan inovatif untuk perbaikan Pembangunan.<br>Memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam setiap langkah pembangunan. Kabupaten Probolinggo memiliki daya saing yang kuat dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam keberhasilan capaian pembangunannya.<br>**SAE ekonomi dan infrastrukturnya,** yaitu maju secara ekonomi, didukung infrastruktur yang berkualitas, merata, serta berpijak pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan |

### 2.6.1 Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan, memberikan arah yang jelas, sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan dengan Pokok-pokok visi sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

**Table 6 - Keterkaitan Pokok-pokok Visi Terhadap Misi**

| No. | Pokok-pokok Visi | Misi |
|---|---|---|
| 1. | Sejahtera | Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau |
| | | Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas |
| 2. | Amanah - Religius | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif |

| No. | Pokok-pokok Visi | Misi |
|---|---|---|
| 3. | Eksis – Berdaya Saing | Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil, serta perwilayahan industri secara merata |
| | | Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan |

Adapun penjelasan misi, sebagaimana disajikan dalam uraian berikut:

1. **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif (SAE Pemerintahan)**

   Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat sampai pada level pemerintahan desa. Yang dilakukan dengan memastikan kualitas aparatur organisasi pemerintah daerah yang kompeten prestasi, berkinerja dan loyal. Didukung dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. **Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang Kreatif dan Inovatif di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Berbasis Desa dan Komunitas Untuk Menciptakan Lapangan Kerja dan Memberantas Kemiskinan (SAE Ekonomi)**

   Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat memperkuat daya saing daerah terutama dalam meningkatkan nilai investasi, salah satunya melalui revitalisasi BUMD. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui peningkatan produktivitas para pelaku ekonomi maupun sektor-sektor unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, industri, dan perdagangan yang terstandarisasi secara global, berakar pada budaya lokal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. **Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar lainnya yang Terjangkau (SAE Pendidikan dan Kesehatan)**

   Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat dilihat melalui angka Indeks Pembangunan Manusia, yang diukur melalui tiga dimensi

yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, membutuhkan komitmen dan kerjasama dari para pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melaksanakan program pengembangan karakter (religius dan berbudi pekerti luhur) bersama dengan Lembaga Pendidikan formal dan non formal berbasiskan agama dan kepercayaan secara bertahap dan terukur.

4. **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah Basis Produksi, Daerah Terluar, Daerah Terpencil, serta Perwilayahan Industri secara Merata (SAE Infrastruktur)**

   Infrastruktur yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya. Infrastruktur yang kuat akan mempercepat respon pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan daerah seperti ketimpangan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pemerataan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan lapangan kerja.

5. **Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas (SAE Sosial)**

   Peningkatan akses layanan publik yang inklusif dan responsif harus diwujudkan, khususnya bagi perempuan, masyarakat adat, pemuda, masyarakat rentan dan disabilitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang menegakkan keadilan sosial, dengan mendorong kesetaraan gender dan keberpihakan terhadap kelompok marginal dan rentan dapat diwujudkan baik dalam bentuk program maupun regulasi atau kebijakan. Dengan memberdayakan kelompok rentan, tidak hanya menyelesaikan persoalan ketidaksetaraan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah. Selain itu, dapat pula menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan harmonis, dengan memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama, sehingga terwujud masyarakat yang adil, inklusif, dan damai sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjawab isu strategis pembangunan dalam lima tahun

mendatang, sekaligus menjadi pondasi penting dalam membangun Kabupaten Probolinggo yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Gambaran kesesuaian misi dalam menjawab isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Table 7 - Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Untuk Menjawab Isu Strategis**

| No. | Isu Strategis | Misi |
|---|---|---|
| 1. | Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Misi 2: SAE Ekonomi<br>Misi 5: SAE Sosial |
| 2. | Pembangunan kewilayahan, khususnya infrastruktur daerah, dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) | Misi 4: SAE Infrastruktur |
| 3. | Memutus transmisi kemiskinan melalui pendekatan kolaboratif yang berorientasi pada graduasi dan pemberdayaan dalam memenuhi kebutuhan dasar. | Misi 3: SAE Pendidikan dan Kesehatan<br>Misi 5: SAE Sosial |
| 4. | Penguatan pondasi berbagai upaya peningkatan kualitas atau kompetensi sumberdaya manusia pelaku pembangunan pada layanan dasar, baik dari masyarakat, pelaku usaha, maupun aparatur pemerintah daerah. Khususnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar terutama bagi kelompok rentan. | Misi 1: SAE Pemerintahan<br>Misi 3: SAE Pendidikan dan Kesehatan |
| 5. | Penguatan pondasi berbagai upaya penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dengan optimalisasi aktivitas ekonomi hijau dan biru berbasis sumberdaya lokal | Misi 2: SAE Ekonomi<br>Misi 4: SAE Infrastruktur |
| 6. | Penguatan pondasi berbagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah maupun permukiman yang berwawasan lingkungan dan aman bencana | Misi 4: SAE Infrastruktur |

| No. | Isu Strategis | Misi |
|---|---|---|
| 7. | Penguatan pondasi tata kelola pemerintahan yang gesit (agile), kolaboratif, dan pelayanan publik yang adaptif | Misi 1: SAE Pemerintahan |
| 8. | Penguatan pengelolaan keuangan daerah: optimalisasi peningkatan PAD; kelembagaan pengelolaan belanja daerah yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan dan kerjasama antar stakeholder pembangunan | Misi 1: SAE Pemerintahan |

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, visi dan misi Kabupaten Probolinggo tahun 2025–2029 juga disusun dengan memperhatikan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Keselarasan ini menjadi landasan penting agar pelaksanaan pembangunan di daerah tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi bagian yang terintegrasi dari pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang secara menyeluruh. Selain itu, keselarasan ini juga memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo mampu berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional, sekaligus menjawab tantangan dan isu strategis daerah. Berikut merupakan keselarasan visi dan misi Kabupaten Probolinggo terhadap Nasional dan Provinsi Jawa Timur:

### 2.6.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan dengan indikator yang telah terukur dan terarah secara fokus agar pencapaiannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berikut adalah uraian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029:

| Tujuan dan Sasaran Misi 1 | Sasaran |
|---|---|
| 1. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dengan indikator tujuannya adalah meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dan terciptanya kolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (joint outcomes). | Berdasarkan gambar di atas, tujuan ini diturunkan menjadi empat sasaran yaitu:<br>a. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah;<br>b. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan ASN;<br>c. Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif; dan<br>d. Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Daerah. |

| Tujuan dan Sasaran Misi 2: | Sasaran |
|---|---|
| 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan. | a. Berdasarkan gambar di atas, tujuan ini diturunkan menjadi 4 sasaran, yaitu:<br>b. Meningkatnya Investasi Daerah;<br>c. Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah;<br>d. Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif;<br>e. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif. |

| Tujuan dan Sasaran Misi 3: | Sasaran |
|---|---|
| 1. Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesejahteraan, dengan indikator ketercapaian tujuannya adalah Indeks Pembangunan Masyarakat. | Berdasarkan gambar di atas, tujuan ini diturunkan menjadi empat sasaran yaitu:<br>1. Meratanya Akses Pendidikan;<br>2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;<br>3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda; dan<br>4. Meningkatnya Kualitas Desa. |

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke 1 dari RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 . BPPKAD Kabupaten Probolinggo berperan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah. Oleh karena itu, BPPKAD Kabupaten Probolinggo perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Table 8 - Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo**

| No | Tujuan | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|---|
| 1. | Tujuan ke 3; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing. | 1. Dukungan pimpinan<br>2. Kemampuan Anggaran yang memadai<br>3. Kualitas SDM yang memadai<br>4. Sarana dan Prasarana Gedung dan Meubelair memadai<br>5. Sistem aplikasi IT cukup | 1. Munculnya kebijakan *Refocusing* Anggaran setelah penetapan APBD<br>2. Masih ada beberapa SKPD yang masih belum mengikuti peraturan penatausahaan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | memadai<br>6. Semangat dan komitmen seluruh jajaran staf<br>7. Dukungan regulasi pemerintah pusat dan provinsi;<br>8. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi;<br>9. Kerjasama dengan mitra kerja (perbankan, perguruan tinggi, perusahaan, asosiasi). | 3. Adanya SKPD yang mengalami *merger* sehingga mempengaruhi data BMD<br>4. SDM yang belum optimal<br>5. Era Digitalisasi versi 5.0; |

## 2.7 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk tahun 2025-2029 adalah: **"Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan**" yang Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu; "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**"" Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh lndonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif,menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan. Dengan ***visi baru*** ini, Kementerian Keuangan dengan sepenuh hati memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara. Kementerian Keuangan juga memperbarui *misi*nya agar mencerminkan kegiatan inti dan

mandatnya dengan lebih baik, yaitu;

1. Mengelola kebijakan fiskal dan keuangan negara agar lebih adaptif, inklusif, dan produktif, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan APBN / APBD, termasuk melalui efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan negara.
3. Memperkuat transparansi dan tata kelola keuangan melalui struktur kelembagaan yang lebih tajam (penambahan Ditjen Strategi Ekonomi & Fiskal; Ditjen Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan; serta badan teknologi/informasi dan intelijen keuangan).
4. Mendorong transformasi dari proses (process-based) ke hasil (outcome-based) dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keuangan negara.
5. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan OPD, pemerintah pusat/daerah, sektor swasta, untuk mendukung visi presiden dan tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Keuangan menetapkan (tujuh) **tujuan** yang akan dicapai pada tahun 2025-2029' sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan strategis fiskal dan ekonomi.
2. Efisiensi dan optimalisasi belanja negara.
3. Meningkatkan efektivitas penerimaan negara.
4. Transformasi kelembagaan & tata kelola yang outcome-based.
5. Meningkatkan sumber daya manusia dan budaya organisasi
6. Transparansi, integritas, dan kepercayaan public
7. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuh tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. Pembentukan dan penguatan struktur kelembagaan:
    - Penambahan **2 Direktorat Jenderal dan 1 badan baru** dalam struktur Kementerian Keuangan agar visi-misi dan fungsi strategisnya lebih tajam
    - Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal; Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan; serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dibentuk
2. Transformasi orientasi dari **business as usual / process-based** menjadi **outcome-based** dalam peta proses bisnis dan implementasi kebijakan
3. Memperkuat visi bahwa Kemenkeu akan menjadi bagian penting dari “strategic diamonds” (berada dalam jajaran kementerian/lembaga strategis

langsung di bawah Presiden) yang bertanggung jawab dalam kebijakan ekonomi dan keuangan negara.

4. Menajamkan kebijakan fiskal dan ekonomi melalui Ditjen Strategi Ekonomi & Fiskal (yang sebelumnya bentuk lainnya seperti BKF) agar kebijakan keuangan dan pajak lebih proaktif dan strategis.
5. Stabilitas dan pengembangan sektor keuangan menjadi salah satu fokus, termasuk kerja sama internasional di bidang keuangan.
6. Pengelolaan teknologi, informasi, dan intelijen keuangan agar lebih modern, adaptif, dan mendukung pengambilan kebijakan yang cepat & tepat.

**Table 9 - Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

| Sasaran Strategis K/L Kementerian Keuangan 2020 - 2024 | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | Pendukung | Penghambat |
| 1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif | 1. - | - | - |
| 2. Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal | 2. Kurang optimalnya pelaporan pajak pusat yang di pungut oleh daerah | Adanya komitmen daerah untuk mengoptimalkan pelaporan pajak pusat, | Keterbatasan SDM, Sarpras maupun kendala aplikasi yang masih mengalami transisi |
| 3. Alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat | 3. Kurang optimalnya pelaporan penggunaan dana transfer dan TKDD dari daerah ke pusat | penggunaan dana transfer, dana TKDD dan Realisasi APBD dengan system aplikasi yang memadai | - |
| 4. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel; | 4. Kurang optimalnya pelaporan realisasi APBD kepada K/L | - | - |
| 5. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; | 5. Kurangnya koordinasi/sinkronisasi atas pengalihan asset K/L ke daerah | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali | 6. - | - | - |
| 7. Organisasi dan SDM yang optimal | 7. - | - | - |
| 8. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; | 8. - | - | - |
| 9. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan | 9. - | - | - |
| 10. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal. | 10. - | - | - |

### 2.7.1 Telaahan Renstra Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 dengan visi "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong". Memperhatikan visi dan misi pembangunan Jawa Timur sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tersebut, BPKAD sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
e) Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Table 10 - Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

| Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur 2019 - 2024 | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | Pendukung | Penghambat |
| • Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | - | - | - |
| • Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Jawa Timur | 2. Masih adanya permasalahan pengadministrasian aset provinsi dengan daerah | Adanya komitmen bersama untuk menyelesaikan aset provinsi dengan daerah | Kurangnya bukti dukung dokumen pengalihan aset maupun kepemilikan asset |
| 3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se Jawa Timur | 3. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | Adanya komitmen daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | Keterbatasan SDM, Sarpras maupun kendala aplikasi yang masih mengalami transisi |

## 2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo adalah untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo sebagai sentra komoditas pertanian yang berdaya saing di tingkat Jawa-Bali dengan mengembangkan agropolitan di Bagian Barat dan di Bagian Timur serta minapolitan di bagian Utara dan Tengah yang didukung oleh industri dan ekowisata.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud maka disusunlah kebijakan penataan ruang wilayah meliputi;

a. pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata;
b. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan;
c. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan;
d. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri, ekowisata dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien;

Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dari integrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dalam tupoksinya BPPKAD Kabupaten Probolinggo tidak secara langsung berkaitan dengan Tata Ruang Wilayah maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Namun ada beberapa Kajian RTRW yang menjadi perhatian dari BPPKAD terkait dengan impikasinya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah sasaran BPPKAD, yaitu sebagai berikut;

**Table 11 - Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

| NO | RTRW KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 - 2023 TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PENGHAMBAT | PENDORONG |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa | Banyaknya parkir liar dan sulit ditertibkan | Kurangnya law enforcement / penegakan hukum | Potensi PAD meningkat |
| 2 | Fasilitasi pertumbuhan kawasan perumahan secara vertikal | Penyediaan kebutuhan air rumah tangga semakin besar | Ketaatan dan kesadaran WP dalam membayar pajak air tanah masih rendah | Potensi PAD Pajak air tanah meningkat. |

## 2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan BPPKAD Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, *Isu strategis* dalam ruang lingkup BPPKAD adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
   Terdapat potensi praktik korupsi dan manipulasi anggaran yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan kepercayaan publik, serta ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yang belum optimal.
2. Manajemen Pengelolaan Aset Daerah yang belum Optimal:
   Banyak aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal, pencatatannya kurang rapi, bahkan ada yang terbengkalai, sehingga menghambat potensi pendapatan dan pembangunan.
3. Pemanfaatan PAD yang Belum Optimal:
   Kurangnya intensitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta belum maksimalnya pendataan pendapatan lain yang sah, menyebabkan PAD belum berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian daerah.

### 2.9.1 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan tidak merugikan dan melanggar ketentuan tentang Lingkungan Hidup di masyarakat.

**Table 12 - TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan BPPKAD | Permasalahan BPPKAD | ISU KLHS YANG RELEVAN Dengan BPPKAD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN Dengan BPPKAD | | | ISU STRATEGIS BPPKAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD dan Perubahan APBD sesuai target waktu yang ditentukan | 1. Keterlambatan Tahapan Proses:<br>Proses penyusunan APBD sering terhambat karena Keterlambatan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang menjadi dasar KUA dan PPAS, serta keterlambatan pembahasan antara eksekutif dan legislatif. | 1. Integrasi Prinsip Keberlanjutan dalam Kebijakan Keuangan:<br>KLHS menjadi panduan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan program, termasuk dalam sektor keuangan daerah.<br>2. Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Transparan:<br>Dengan mempertimbangkan aspek | 1. Perubahan iklim,<br>- BPPKAD berperan dalam menyusun anggaran daerah yang responsif terhadap isu lingkungan, misalnya alokasi dana untuk program adaptasi perubahan iklim dan konservasi.<br>- BPPKAD harus mengintegrasikan prinsip pembangunan | Perubahan Iklim dan Pemanasan Global:<br>1. Deforestasi: Penggundulan hutan untuk perkebunan atau pembangunan infrastruktur menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan berkurangnya kemampuan penyerapan karbon.<br>2. Polusi Plastik: Maraknya penggunaan plastik sekali | 1. Pertumbuhan Penduduk<br>2. Alih fungsi lahan pertanian.<br>3. Tingginya tingkat pengangguran<br>4. Bencana Alam<br>5. Dll. | 1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah:<br>Terdapat potensi praktik korupsi dan manipulasi anggaran yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan kepercayaan publik, serta ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yang belum optimal.<br>2. Manajemen Pengelolaan Aset Daerah yang belum Optimal:<br>Banyak aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal, pencatatannya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | keberlanjutan, KLHS dapat mendorong peningkatan efektivitas dan kinerja pemerintahan dalam menjalankan program-program pemerintahan, serta memperkuat pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan anggaran kepada publik. | berkelanjutan ke dalam semua sektor pembangunan yang dibiayai melalui APBD | pakai dan kurangnya pengelolaan limbah plastik berdampak serius pada ekosistem perairan dan laut.<br>3. Pencemaran: Pencemaran oleh bahan kimia berbahaya dari industri, serta masalah sampah, merusak kualitas air dan lingkungan lokal. | | kurang rapi, bahkan ada yang terbengkalai, sehingga menghambat potensi pendapatan dan pembangunan.<br>3. Pemanfaatan PAD yang Belum Optimal: Kurangnya intensitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta belum maksimalnya pendataan pendapatan lain yang sah, menyebabkan PAD belum berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian daerah. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Peningkatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | **2. Perencanaan yang Tidak Matang:** Prediksi pendapatan dan belanja yang tidak akurat dapat menyebabkan perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasi di akhir tahun, seperti fluktuasi harga atau perubahan kebijakan. | | Hilangnya keanekaragaman hayati, | Degradasi dan Kerusakan Lingkungan:<br>1. **Dampak Global:** Pening katan suhu global menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan perubahan pola cuaca ekstrem, yang di Indonesia berisiko tinggi menenggelam kan pulau kecil dan wilayah pesisir.<br>2. **Dampak di Indonesia:** An | | . |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | caman banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan semakin sering terjadi, memperburuk kualitas udara dan merusak ekosistem. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1. **Sumber Daya Manusia (SDM)**<br>**Kurangnya Tenaga Ahli:**<br>Pemerintah daerah seringkali kekurangan tenaga ahli yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan modern serta standar akuntansi pemerintah.<br>2. **Sistem dan Teknologi Aplikasi yang Bermasalah**:<br>Banyak permasalahan pada aplikasi Sistem Informasi | | Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. | | | BPPKAD dapat mendorong inovasi pendanaan untuk proyek-proyek lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan energi terbarukan, untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemerintah Daerah (SIPD) yang menyebabkan kebingungan dan ketidaksesuaian data, seperti BKU, SPJ, dan realisasi APBD<br>3. **Minimnya Pemahaman Standar Akuntansi**: Pegawai daerah belum sepenuhnya memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan benar. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah | 1. **Kelemahan Sistem dan Manajemen**: Sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah yang lemah serta manajemen yang belum optimal dalam pengelolaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.<br>**2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya:** Ketidakmampuan menggali potensi sumber PAD karena terbatasnya anggaran, sarana prasarana, dan juga sumber daya | 1. | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | manusia yang kompeten untuk mengelola pendapatan daerah secara efektif.<br>**3. Data yang Tidak Akurat:**<br>Ketersediaan dan pembaruan data objek pajak yang tidak akurat, terutama data untuk usaha daring, sehingga menyulitkan penggalian potensi pajak baru.<br>**4. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan:**<br>Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | membayar pajak dan retribusi masih rendah, sehingga menghambat pemenuhan target PAD. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • Optimalisasi Pengelolaan Barang milik Daerah | 1. Proses inventarisasi aset daerah sering kali tidak tertib, menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data dan aset secara keseluruhan.<br>2. Banyak aset daerah yang belum bersertifikat atau legal, sehingga rentan terhadap sengketa dan mempersulit pengelolaan.<br>3. Banyak aset daerah yang tidak termanfaatkan secara optimal atau | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | menganggur, karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak adanya mekanisme pemanfaatan yang efektif.<br>4. Aset idle hanya akan menjadi beban bagi pemerintah jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, seperti aset yang tidak terpakai namun masih menjadi beban biaya pemeliharaan. | | | | | |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Salah satu elemen utama dalam RPJMD adalah visi pembangunan daerah, yang merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang telah disampaikan saat proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi ini menjadi landasan utama dalam merancang arah pembangunan daerah, dengan tujuan menciptakan kondisi masa depan yang lebih baik sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tantangan yang dihadapi daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan komitmen nyata yang harus diterjemahkan dalam kebijakan dan program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat. Keberhasilan dalam mewujudkan visi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo untuk periode 2025- 2029 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

*"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE"*

*(Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)"*

Visi tersebut mencerminkan cita-cita besar untuk membawa Kabupaten Probolinggo menuju perkembangan yang lebih baik di berbagai sektor. Visi ini mengandung makna mendalam yang mencerminkan harapan akan kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo. Kalimat " *"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE" (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)* memiliki makna mendalam yang mencerminkan semangat dan usaha untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai bagian dari pemerintahan yang berkelanjutan, visi ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan program-program yang telah berjalan, tetapi juga mengusung Semangat Amanah dan RELIGIUS guna meningkatkan kualitas pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat. Semangat Amanah dan RELIGIUS diimplementasikan melalui pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, seluruh potensi daerah akan dimobilisasi secara optimal melalui kerja nyata dan program program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kabupaten Probolinggo. Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Probolinggo yang ***"SAE"*** *(Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing), visi* ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari

lima *misi utama* yang menjadi landasan pembangunan Kabupaten Probolinggo periode 2025-2029. "

- **SAE PEMERINTAHAN:**

  Menciptakan Tatakelola Pemerintahan anti Korupsi, Kolaborasi dan Inovatif
- **SAE INFRASTRUKTUR**

  Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah basis Produksi, daerah Terluar, Daerah Terpencil erta Perwilayahan Industri secara Merata
- **SAE EKONOMI**

  Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang kreatif dan inovatif di sector pertanian, perkebunan, petwrnakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan
- **SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**

  Membangun SDM Unggul, Religius, berdayasaing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau
- **SAE SOSIAL**

  Pemberdayaan Perempuan, masyarakat adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas

**Table 13 - Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BPPKAD**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Meningkatnya Akuntabilitas TataKelola Pemerintah Melalui Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah | | Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.50 | 4 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%) | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD (%) | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Prosentase Penyerapan Anggaran (%) | 87 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 95 | |
| | | | Fleksibilitas Keuangan (%) | 2 | 2.02 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.15 | 2.19 | |
| | | | Solvabilitas Operasional (%) | 81.80 | 81.9 | 82 | 82.1 | 82.2 | 82.3 | 82.4 | |
| | | | Persentase Penilaian Opini BPK (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Solvabilitas Jangka Panjang(%) | 0 | 15.69 | 7 | 51.63 | 290 | 84 | 101 | |
| | | | Solvabilitas Layanan (Rp/org) | 2286321.23 | 2301246.61 | 2488165.39 | 2330768.19 | 2198595.71 | 2086263.17 | 1989822.11 | |
| | | | Solvabilitas Jangka Pendek (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Prosentase Kemandirian Keuangan Daerah (%) | 14 | 16.31 | 17.33 | 18.35 | 19.37 | 20 | 20.39 | |

**TUJUAN;** Meningkatnya Akuntabilitas TataKelola Pemerintah Melalui Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah

Indikator Tujuan: Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)

I. SASARAN; Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah

Indikator Sasaran 1;

II. SASARAN; Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran 2;

1. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%)
2. Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD (%)
3. Prosentase Transparansi
4. Pengelolaan Keuangan Daerah (%)
5. Prosentase Penyerapan Anggaran (%)
6. Fleksibilitas Keuangan (%)
7. Solvabilitas Operasional (%)
8. Persentase Penilaian Opini BPK (%)
9. Solvabilitas Jangka Panjang (%)
10. Solvabilitas Layanan (Rp/org)
11. Solvabilitas Jangka Pendek (%)
12. Prosentase Kemandirian Keuangan Daerah (%)

| DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA BPPKAD 2025–2029 | | FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* |
| **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)** | **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**<br>Ukuran komposit yang menilai kualitas tata kelola keuangan daerah, mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. | **IPKD=**<br>Skor total hasil penilaian aspek pengelolaan keuangan daerah<br>———————<br>Skor maksimum<br>×100 |
| **Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah** | **Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah**<br>Persentase peningkatan nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) perangkat daerah, yang mencerminkan perbaikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pencapaian kinerja. | **% Kenaikan=**<br>Nilai LHE tahun berjalan−Nilai LHE tahun sebelumnya<br>———————<br>Nilai LHE tahun sebelumnya<br>×100 |
| **Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran** | **Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**<br>Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan (Renstra, Renja) dengan dokumen penganggaran (KUA-PPAS, APBD, DPA), sesuai siklus dan ketentuan peraturan perundang-undangan. | **% Kesesuaian=**<br>Jumlah dokumen sesuai ketentuan<br>———————<br>Jumlah dokumen yang wajib disusun<br>×100 |

| | | |
|---|---|---|
| **Persentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD** | **Persentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD**<br>Persentase realisasi pengalokasian anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan kewajiban mandatory spending (misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar) terhadap total APBD. | **% Pengalokasian=**<br>Anggaran yang dialokasikan sesuai prioritas/ mandatory spending<br>———————<br>Total APBD<br>×100 |
| **Persentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Persentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**<br>Tingkat keterbukaan informasi keuangan daerah yang dipublikasikan melalui media resmi (website, laporan publik) sesuai prinsip transparansi dalam pengelolaan APBD. | **% Transparansi=**<br>Jumlah dokumen keuangan yang dipublikasikan<br>———————<br>Jumlah dokumen keuangan yang wajib dipublikasikan<br>×100 |
| **Persentase Penyerapan Anggaran** | **Persentase Penyerapan Anggaran**<br>Perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD, dinyatakan dalam persentase. | **% Penyerapan=**<br>Realisasi Belanja<br>———————<br>Total Anggaran Belanja<br>×100 |

| | | |
|---|---|---|
| **Fleksibilitas Keuangan** | **Fleksibilitas Keuangan**<br>Rasio kemampuan fiskal daerah dalam membiayai belanja tidak mengikat (discretionary spending) terhadap total belanja, menunjukkan ruang fiskal untuk pembangunan. | **Fleksibilitas=**<br>Belanja Tidak Mengikat (discretionary spendin)<br>Total Belanja |
| **Solvabilitas Operasional (%)** | **Solvabilitas Operasional (%)**<br>Rasio antara total pendapatan daerah dengan total belanja operasi, menunjukkan kemampuan keuangan daerah membiayai kebutuhan operasional rutin. | **Solvabilitas Operasional=**<br>Pendapatan Daerah<br>Belanja Operasi<br>×100 |
| **Persentase Penilaian Opini BPK** | **Persentase Penilaian Opini BPK**<br>Persentase pencapaian opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (target WTP: Wajar Tanpa Pengecualian). | **%Opini=**<br>Jumlah tahun dengan Opini WTP<br>Jumlah tahun evaluasi<br>×100 |
| **Solvabilitas Jangka Panjang (%)** | **Solvabilitas Jangka Panjang (%)**<br>Rasio kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang terhadap aset yang dimiliki, menunjukkan keberlanjutan fiskal daerah. | **Solvabilitas Jangka Panjang=**<br>Total Aset<br>Kewajiban Jangka Panjang<br>×100 |

| | | |
|---|---|---|
| **Solvabilitas Layanan (Rupiah)** | **Solvabilitas Layanan (Rupiah)**<br>Rasio atau besaran kemampuan keuangan daerah dalam menyediakan layanan publik (alokasi belanja untuk pelayanan dasar) terhadap total kebutuhan masyarakat. | **Solvabilitas Layanan=**<br>DasarBelanja untuk Layanan Publik<br>Jumlah Penduduk atau Kebutuhan |
| **Solvabilitas Jangka Pendek (%)** | **Solvabilitas Jangka Pendek (%)**<br>Rasio kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. | **Solvabilitas Jangka Pendek=**<br>Aset Lancar<br>Kewajiban Jangka Pendek<br>×100 |
| **Persentase Kemandirian Keuangan Daerah** | **Persentase Kemandirian Keuangan Daerah**<br>Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dari ketergantungan dana transfer pusat/provinsi. | **% Kemandirian=**<br>Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br>Total Pendapatan Daerah<br>×100 |

## A. PENENTUAN STRATEGI RENSTRA BPPKAD

1. **Pengelolaan Keuangan Daerah**
   a. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memastikan proses penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah terbuka dan dapat diakses masyarakat, serta dipertanggungjawabkan secara jujur.
   b. **Efisiensi dan Efektivitas:** Mengelola keuangan daerah agar memberikan manfaat maksimal dan menghindari potensi krisis keuangan.
   c. **Koordinasi Penyusunan APBD:** Melakukan koordinasi dalam menyusun dan membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta rancangan perubahan APBD.
   d. **Pengembangan Sistem Informasi:** Mengembangkan dan menerapkan sistem informasi penganggaran.
2. **Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)**
   a. **Pemanfaatan dan Optimalisasi:** Melaksanakan pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
   b. **Penilaian dan Inventarisasi:** Melakukan penilaian dan inventarisasi BMD untuk memastikan pengelolaannya.
   c. **Pengawasan dan Pengendalian:** Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemeliharaan BMD.
3. **Peningkatan Pendapatan Daerah**
   a. Meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor yang menjadi kewenangan daerah, seperti pajak dan retribusi daerah.

## B. PENAHAPAN RENSTRA BPPKAD

Table 14 - PENAHAPAN RENSTRA BPPKAD

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| Penguatan pondasi tatakelola pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah serta penataan asset daerah yang berkelanjutan. | Percepatan penguatan system pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi yang transparan dan akuntabel disertai peningkatan integrasi data asset daerah untuk mendukung sosial ekonomi inklusi | Pemantapan tatakelola pendapatan yang berkualitas, percepatan digitalisasi manajemen keuangan daerah serta penguatan pengawasan aset daerah yang didukung prinsip responsife, bersih dan akuntabel. | Pemantapan transformasi system pendapatan, Keuangan dan Aset daerah yang terintegrasi serta penyelenggaraan tatakelola Fiskal daerah yang efektif untuk mendukung pelayanan public yang berkualitas. | Perwujudan percepatan transformasi Pendapatan,Keuangan dan Aset daerah yang modern, berkelanjutan serta tatakelola pemerintahan yang berih, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. |

## C. Lokus Renstra BPPKAD Kabupaten Probolinggo

Lokus pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo berada pada ruang lingkup urusan pemerintahan daerah di bidang:

1. **Pengelolaan Pendapatan Daerah**
    - Meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
    - Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
    - Penyediaan sarana prasarana pelayanan pajak dan peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak.
    - Penguatan sistem administrasi pendapatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. **Pengelolaan Keuangan Daerah**
    - Menyelenggarakan seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pertanggungjawaban APBD.
    - Mengelola kas daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
    - Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
    - Menyalurkan bantuan keuangan, dana bagi hasil, serta dana tidak terduga sesuai ketentuan.
3. **Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)**
    - Meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pemeliharaan aset daerah.
    - Melaksanakan inventarisasi, penilaian, dan pengamanan aset daerah.
    - Mengembangkan sistem penatausahaan BMD yang lebih tertib dan modern.
    - Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pendapatan daerah.
4. **Wilayah/Lokus Pelaksanaan**
    - Internal Pemerintah Kabupaten Probolinggo → seluruh perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dan barang.
    - Eksternal → masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi dan penerima manfaat pelayanan; pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan; serta mitra kerja (BUMD, pihak swasta) yang terkait dengan pengelolaan aset maupun pendapatan daerah.

---

## D. ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPPKAD Kabupaten Probolinggo

Arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo dalam periode Renstra disusun untuk mendukung visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah, aset daerah, dan pendapatan asli daerah. Arah kebijakan ini menekankan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

1. **Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**
    - Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
    - Memperkuat sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi.
    - Meningkatkan kualitas layanan pajak dan retribusi daerah agar lebih

mudah, cepat, dan transparan.

- Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

**2. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah**

- Mewujudkan perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih partisipatif, realistis, dan tepat waktu.
- Meningkatkan kualitas penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP).
- Meningkatkan efektivitas pengelolaan kas daerah agar lebih efisien, likuid, dan transparan.
- Meningkatkan kepatuhan perangkat daerah dalam siklus pengelolaan keuangan.

**3. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)**

- Meningkatkan tertib administrasi aset daerah melalui inventarisasi, penatausahaan, dan pelaporan yang akurat.
- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan potensi pendapatan daerah.
- Meningkatkan pengamanan, pemeliharaan, dan legalitas aset daerah untuk menghindari kehilangan atau sengketa aset.
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan BMD.

**4. Bidang Dukungan Tata Kelola Pemerintahan**

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang berkualitas.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang keuangan, aset, dan pendapatan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan administrasi perkantoran untuk mendukung efektivitas kerja organisasi.
- Memperkuat sistem pengendalian internal serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

**Table 15 - Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA BPPKAD**

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPPKAD | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| | • **Penerapan NSPK Penyusunan APBD:** BPKAD akan menerapkan standar | • Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan | • **Pengelolaan Keuangan Daerah**<br>○ **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memastikan proses | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | dan prosedur yang telah ditetapkan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah agar sesuai dengan kebijakan dan target yang telah disepakati.<br>• **Implementasi NSPK Audit dan Pelaporan Keuangan:** BPKAD memastikan proses audit internal dan pelaporan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku agar hasilnya akurat dan dapat dipercaya.<br>• **Pelaksanaan NSPK Pengelolaan Aset Daerah:** BPKAD menerapkan pedoman-pedoman yang mengatur cara pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset daerah secara sistematis.<br>• **Pelaksanaan NSPK Pengelolaan** | Strategis Kabupaten Probolinggo<br>• Peningkatan Dan Perluasan Akses Terhadap Hak-Hak Dasar Masyarakat (Miskin, Rentan, Dan Termarginalkan) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan, Khususnya Kemiskinan Ekstrem<br>• Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Kolaboratif, Dan Inovatif<br>• Peningkatan Layanan | penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah terbuka dan dapat diakses masyarakat, serta dipertanggungjawabkan secara jujur.<br>○ **Efisiensi dan Efektivitas:** Mengelola keuangan daerah agar memberikan manfaat maksimal dan menghindari potensi krisis keuangan.<br>○ **Koordinasi Penyusunan APBD:** Melakukan koordinasi dalam menyusun dan membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta rancangan perubahan APBD.<br>○ **Pengembangan Sistem Informasi:** Mengembangkan dan menerapkan sistem informasi penganggaran.<br>• **Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)**<br>○ **Pemanfaatan dan Optimalisasi:** Melaksanakan pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.<br>○ **Penilaian dan Inventarisasi:** Melakukan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Pendapatan Daerah:**<br>BPKAD menerapkan pedoman-pedoman yang mengatur cara penetapan, pemunguatan/Penagihan Pajak Daerah. | Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah sebagai Pilar Kemajuan Daerah | penilaian dan inventarisasi BMD untuk memastikan pengelolaannya.<br>○ **Pengawasan dan Pengendalian:** Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemeliharaan BMD.<br>• **Peningkatan Pendapatan Daerah**<br>○ Meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor yang menjadi kewenangan daerah, seperti pajak dan retribusi daerah. | |

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, Output , Outcome

Program dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan beserta indikator keluarannya pagu ini tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan. Pemilihan Program/Kegiatan/Subkegiatan ini didasarkan atas kebutuhan dan Efektifitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Indikator keluaran Program/Kegiatan/Subkegiatan yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja dalam rangka pencapaian target dari visi dan misi kepala daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat disajikan sebagai berikut:

**Table 16 - TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Meningkatnya Akuntabilitas TataKelola Pemerintah Melalui Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah | | | | Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kinerja | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD | 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD | 5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.02.01.2.06.0008 – Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan | 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | | | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | | |
| | | | | | Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD | | |
| | | | | | Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | | |
| | | | | | Prosentase Penyerapan Anggaran | | |
| | | | | | Fleksibilitas Keuangan | | |
| | | | | | Persentase Penilaian Opini BPK | | |
| | | | | | Solvabilitas Operasional | | |
| | | | | | Solvabilitas Jangka Panjang | | |
| | | | | | Solvabilitas Layanan (Rp/org) | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Solvabilitas Jangka Pendek | | |
| | | | | | Prosentase Kemandirian Keuangan Daerah | | |
| | | | Pencapaian Pengelolaan Keuangan ,penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan keuangan daerah | | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | |
| | | | | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD) | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | |
| | | | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | |
| | | | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Realisasi Penyerapan Belanja APBD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | |
| Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | |
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | |
| Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prosentase SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 5.02.02.2.03.0004 - Konsolidas Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | |
| | | | | Persentase Penyaluran Dana | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga dan Dana Bagi Hasil | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | |
| | | | | Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | |
| | | | Terkelolanya Barang Milik Daerah dengan tertib sesuai peraturan dan perundang undangan | | Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA) | 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | |
| | | | | Prosentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundangundangan dan tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
| | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
| | | | | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
| | | | | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | |
| Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah | |
| Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah | |
| Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah | |
| Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | |

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program Organisai Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisai Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat kabupaten.

Dengan telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan kebijakan yang diambil untuk lima tahun ke depan, maka dalam rangka mewujudkan tujuan BPPKAD Kabupaten Probolinggo, perlu direncanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk lebih memudahkan dalam sinkronisasi program dan kegiatan yang ada di RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Probolinggo disesuaikan dengan alur proses pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yaitu:

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**;

Penjabaran/ implementasi program ini berupa kegiatan dan subkegiatan yang berada di kesekretariatan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, yaitu;

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
   a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
   b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.
   c) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan;
   a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
   a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dengan sub kegiatan;
a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d) Penyediaan bahan logistik kantor.
e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
f) Fasilitasi kunjungan tamu.
g) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
i) Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.

6) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**,** dengan sub kegiatan;
a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pengadaan mebel.
d) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
e) Pengadaan Aset Tak Berwujud
f) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
g) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya.

7) Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**,** dengan sub kegiatan;
a) Penyediaan jasa surat menyurat.
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
d) Penyediaan jasa pelayanan umum.

8) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah, dengan sub kegiatan;
a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
c) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**B. Program pengelolaan keuangan daerah;**

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan dan subkegiatan yang membidangi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah, yaitu;

1) Kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, dengan sub kegiatan;
   a) Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS.
   b) Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
   c) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
   d) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
   e) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
2) Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, dengan sub kegiatan;
   a) Koordinasi dan pengelolaan kas daerah.
   b) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   d) Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
   e) Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan
   f) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3) Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dengan sub kegiatan;
   a) Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.
   b) Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran.
   c) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
   d) Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan

peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota

4) Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dengan subkegiatan;
   a) Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
   b) Pengelolaan dana darurat dan mendesak
   c) Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota
5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**,** dengan sub kegiatan;
   a) Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah

**C. Program pengelolaan barang milik daerah;**

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan dan subkegiatan yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) daerah, yaitu;

1) Kegiatan pengelolaan barang milik daerah, dengan sub kegiatan;
   a) Penyusunan Standar Harga
   b) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
   c) Penatausahaan Barang Milik Daerah
   d) Inventarisasi barang milik daerah
   e) Pengamanan barang milik daerah
   f) Penilaian Barang Milik Daerah
   g) Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang mili daerah

**D. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;**

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan dan subkegiatan yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, yaitu;

1) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan;
   a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
   b) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
   c) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
   d) Penetapan wajib pajak daerah
   e) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
   f) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
   g) Penagihan pajak daerah
   h) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

**Table 17 - DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN**

| Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Definisi Operasional Indikator Program/Kegiatan | Formula Perhitungan Indikator Program/Kegiatan |
|---|---|---|---|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD adalah skor atau predikat yang diperoleh **Perangkat Daerah (PD)** berdasarkan hasil **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat sesuai kewenangannya.<br>- **Komponen Penilaian (Mengacu Sistem AKIP KemenPANRB)**<br>• **Perencanaan Kinerja** (Relevansi sasaran, indikator, konsistensi dengan RPJMD).<br>• **Pengukuran Kinerja** (Indikator kinerja utama, target, realisasi, analisis).<br>• **Pelaporan Kinerja** (Kelengkapan dan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP).<br>• **Evaluasi Internal** (pengendalian, monitoring, tindak lanjut hasil evaluasi).<br>• **Capaian Kinerja** (output dan outcome yang dihasilkan). | **Nilai Angka (0–100).**<br><br>**Predikat Kinerja:**<br><br>AA (Sangat Memuaskan)<br>A (Memuaskan)<br>BB (Sangat Baik)<br>B (Baik)<br>CC (Cukup)<br>C (Kurang)<br>D (Sangat Kurang). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | **Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja** adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menyusun dan menyediakan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, serta dokumen evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tepat waktu. | **Persentase Penyusunan Dokumen=** Jumlah Dokumen yang Disusun sesuai Ketentuan / Jumlah Dokumen yang Wajib Disusun **×100%** |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun | **Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun** adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat ketersediaan dan keteraturan penyusunan dokumen administrasi keuangan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | **Persentase Dokumen Tersusun=** Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun dengan Benar / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Wajib Disusun **×100%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana adalah ukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana perangkat daerah telah melaksanakan proses administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar prosedur operasional, serta jadwal yang telah ditetapkan. | **Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian=**<br>Jumlah Dokumen/Proses Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi<br>———————<br>Jumlah Dokumen/Proses Administrasi Kepegawaian yang wajib Terpenuhi<br>**×100%** |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana | **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana** adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan kegiatan administrasi umum di perangkat daerah sesuai dengan ketentuan, standar operasional prosedur (SOP), dan jadwal yang ditetapkan. | **Persentase Administrasi Umum Terlaksana=**<br>Jumlah Kegiatan/Dokumen Administrasi Umum yang Terlaksana<br>———————<br>Jumlah Kegiatan/Dokumen Administrasi Umum yang Wajib Dilaksanakan<br>**×100%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan | **Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan** adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dibandingkan dengan rencana atau kebutuhan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. | **Persentase BMD yang Diadakan=**<br>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang Telah Diadakan<br>———————<br>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang Direncanakan<br>**×100%** |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | **Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah** ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan penyediaan berbagai jenis jasa penunjang yang dibutuhkan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dibandingkan dengan kebutuhan yang telah direncanakan. | **Persentase Penyediaan Jasa Penunjang=**<br>Jumlah Jasa Penunjang yang Telah Disediakan<br>———————<br>Jumlah Jasa Penunjang yang Direncanakan<br>**×100%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara adalah ukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana barang milik daerah yang digunakan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah mendapatkan pemeliharaan sesuai standar yang ditetapkan, dibandingkan dengan jumlah seluruh BMD penunjang yang ada. | **Persentase BMD Terpelihara=**<br>Jumlah BMD Penunjang yang Terpelihara<br>———————<br>Jumlah Seluruh BMD Penunjang<br>**×100%** |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | **Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah: Pencapaian Pengelolaan Keuangan dari penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan keuangan daerah | **Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah =**<br>%penganggaran + %penatausahaan + %pelaporan<br>———————<br>3 |
| Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan **Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** serta **Perubahan APBD (P-APBD)** sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. | **Persentase Ketepatan Waktu=**<br>Jumlah Seluruh Dokumen APBD/P-APBD yang Wajib Disusun<br>———————<br>Jumlah Dokumen APBD/P-APBD yang Disusun Tepat Waktu<br>×100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Realisasi Belanja APBD | Persentase Realisasi Belanja APBD adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara **jumlah belanja daerah yang terealisasi** dengan **jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD** pada periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui APBD. | **Persentase Realisasi Belanja APBD**= Anggaran Belanja Daerah dalam APBD / Realisasi Belanja Daerah ×100% |
| Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Prosentase SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD | Persentase SKPD yang melaksanakan rekonsiliasi akun di LKPD adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan **rekonsiliasi data transaksi keuangan** dengan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk penyusunan **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**. | **Persentase Rekonsiliasi SKPD**= Jumlah SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Jumlah Seluruh SKPD / ×100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga dan Dana Bagi Hasil | Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga (DTT), dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat realisasi penyaluran ketiga jenis dana tersebut dibandingkan dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. | **Persentase Penyaluran Dana=**<br>Realisasi Penyaluran Dana (Bantuan Keuangan + DTT + DBH)<br>———————————<br>Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan + DTT + DBH)<br>**×100%** |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA) | **Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)** adalah: suatu alat ukur untuk menilai efektivitas pengelolaan aset daerah, yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. IPAD digunakan sebagai indikator kinerja dalam evaluasi reformasi birokrasi di bidang pengelolaan aset daerah | Penjumlahan dari:<br>1. Perencanaan dan Pengadaan Aset<br>2. Kepatuhan aset<br>3. Pemanfaatan set<br>4. Pengelolaan aset<br>5. Inovasi dan tekologi pengelolaan aset |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Prosentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundangundangan dan tepat waktu | Persentase SKPD yang tertib pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan pengelolaan BMD sesuai dengan **peraturan perundang-undangan** (Permendagri tentang pengelolaan BMD, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah) serta **tepat waktu** dalam penyampaian laporan maupun pelaksanaan kewajiban administrasi aset. | **Persentase SKPD Tertib=**<br>Jumlah Seluruh SKPD yang Wajib Mengelola BMD<br>———————<br>Jumlah SKPD yang Tertib Mengelola BMD<br>**×100%** |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | **Pendapatan Asli Daerah (PAD):** sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi asli daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan daerah. Secara lebih rinci, PAD mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. | **Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)=**<br>PAD<br>———————<br>Total Pendapatan<br>**×100%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) | **Pendapatan Asli Daerah (PAD):** sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi asli daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan daerah. Secara lebih rinci, PAD mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. | **Realisasi PAD (Rupiah)=**<br>Target PAD dalam APBD<br>Realisasi Penerimaan PAD<br>**×100%** |

## Table 18 - RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

## BPPKAD - PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 5.02 - KEUANGAN | | | | 525.630.913.642,64 | | 541.468.745.229,00 | | 549.388.779.038,00 | | 562.903.500.131,00 | | 563.299.571.193,00 | | |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 12.200.960.649,64 | | 12.336.600.000,00 | | 12.520.500.000,00 | | 12.776.000.000,00 | | 13.075.600.000,00 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD | 81.86 | 83.08 | 12.200.960.649,64 | 83.49 | 12.336.600.000,00 | 84.31 | 12.520.500.000,00 | 85.13 | 12.776.000.000,00 | 86.30 | 13.075.600.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 29.653.200,00 | | 29.800.000,00 | | 30.050.000,00 | | 30.300.000,00 | | 30.550.000,00 | | |
| Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 | 7 | 29.653.200,00 | 7 | 29.800.000,00 | 7 | 30.050.000,00 | 7 | 30.300.000,00 | 7 | 30.550.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dan Evaluasi Kinerja | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 16.200.000,00 | | 16.300.000,00 | | 16.400.000,00 | | 16.500.000,00 | | 16.600.000,00 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 | 7 | 16.200.000,00 | 7 | 16.300.000,00 | 7 | 16.400.000,00 | 7 | 16.500.000,00 | 7 | 16.600.000,00 | | |
| 5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 8.583.200,00 | | 8.600.000,00 | | 8.650.000,00 | | 8.700.000,00 | | 8.750.000,00 | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 | 3 | 8.583.200,00 | 3 | 8.600.000,00 | 3 | 8.650.000,00 | 3 | 8.700.000,00 | 3 | 8.750.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4.870.000,00 | | 4.900.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.100.000,00 | | 5.200.000,00 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 | 12 | 4.870.000,00 | 12 | 4.900.000,00 | 12 | 5.000.000,00 | 12 | 5.100.000,00 | 12 | 5.200.000,00 | | |
| 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 11.646.339.567,00 | | 11.646.493.167,00 | | 11.646.643.167,00 | | 11.647.493.167,00 | | 11.674.893.167,00 | | |
| Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | 12 | 11.646.339.567,00 | 12 | 11.646.493.167,00 | 12 | 11.646.643.167,00 | 12 | 11.647.493.167,00 | 12 | 11.674.893.167,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 900 | 915 | | 917 | | 919 | | 922 | | 925 | | | |
| 5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 11.643.793.167,00 | | 11.643.893.167,00 | | 11.643.993.167,00 | | 11.644.793.167,00 | | 11.644.893.167,00 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 900 | 915 | 11.643.793.167,00 | 917 | 11.643.893.167,00 | 919 | 11.643.993.167,00 | 922 | 11.644.793.167,00 | 925 | 11.644.893.167,00 | | |
| 5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 2.546.400,00 | | 2.600.000,00 | | 2.650.000,00 | | 2.700.000,00 | | 30.000.000,00 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | 12 | 2.546.400,00 | 12 | 2.600.000,00 | 12 | 2.650.000,00 | 12 | 2.700.000,00 | 12 | 30.000.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 4.283.500,00 | | 4.400.000,00 | | 4.500.000,00 | | 4.600.000,00 | | 4.700.000,00 | | |
| Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 24 | 26 | 4.283.500,00 | 27 | 4.400.000,00 | 28 | 4.500.000,00 | 29 | 4.600.000,00 | 30 | 4.700.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 90 | 92 | | 93 | | 94 | | 95 | | 96 | | | |
| 5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 2.043.500,00 | | 2.100.000,00 | | 2.150.000,00 | | 2.200.000,00 | | 2.250.000,00 | | |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 90 | 92 | 2.043.500,00 | 93 | 2.100.000,00 | 94 | 2.150.000,00 | 95 | 2.200.000,00 | 96 | 2.250.000,00 | | |
| 5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 2.240.000,00 | | 2.300.000,00 | | 2.350.000,00 | | 2.400.000,00 | | 2.450.000,00 | | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 24 | 26 | 2.240.000,00 | 27 | 2.300.000,00 | 28 | 2.350.000,00 | 29 | 2.400.000,00 | 30 | 2.450.000,00 | | |
| 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 42.187.400,00 | | 42.400.000,00 | | 42.800.000,00 | | 43.200.000,00 | | 43.600.000,00 | | |
| Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 | 7 | 42.187.400,00 | 8 | 42.400.000,00 | 9 | 42.800.000,00 | 10 | 43.200.000,00 | 11 | 43.600.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 | 115 | | 120 | | 125 | | 130 | | 135 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 | 37 | | 40 | | 42 | | 44 | | 46 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
| 5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.838.900,00 | | 1.850.000,00 | | 1.900.000,00 | | 1.950.000,00 | | 2.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 | 13 | 1.838.900,00 | 14 | 1.850.000,00 | 15 | 1.900.000,00 | 16 | 1.950.000,00 | 17 | 2.000.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 13.570.700,00 | | 13.600.000,00 | | 13.650.000,00 | | 13.700.000,00 | | 13.750.000,00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | 7 | 13.570.700,00 | 8 | 13.600.000,00 | 9 | 13.650.000,00 | 10 | 13.700.000,00 | 11 | 13.750.000,00 | | |
| 5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 590.000,00 | | 600.000,00 | | 650.000,00 | | 700.000,00 | | 750.000,00 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 | 5 | 590.000,00 | 6 | 600.000,00 | 7 | 650.000,00 | 8 | 700.000,00 | 9 | 750.000,00 | | |
| 5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 3.173.000,00 | | 3.200.000,00 | | 3.250.000,00 | | 3.300.000,00 | | 3.350.000,00 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | 5 | 3.173.000,00 | 6 | 3.200.000,00 | 7 | 3.250.000,00 | 8 | 3.300.000,00 | 9 | 3.350.000,00 | | |
| 5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 13.617.800,00 | | 13.650.000,00 | | 13.700.000,00 | | 13.750.000,00 | | 13.800.000,00 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | 7 | 13.617.800,00 | 8 | 13.650.000,00 | 9 | 13.700.000,00 | 10 | 13.750.000,00 | 11 | 13.800.000,00 | | |
| 5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000,00 | | 3.050.000,00 | | 3.100.000,00 | | 3.150.000,00 | | 3.200.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 | 7 | 3.000.000,00 | 8 | 3.050.000,00 | 9 | 3.100.000,00 | 10 | 3.150.000,00 | 11 | 3.200.000,00 | | |
| 5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4.959.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.050.000,00 | | 5.100.000,00 | | 5.150.000,00 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 | 37 | 4.959.000,00 | 40 | 5.000.000,00 | 42 | 5.050.000,00 | 44 | 5.100.000,00 | 46 | 5.150.000,00 | | |
| 5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1.438.000,00 | | 1.450.000,00 | | 1.500.000,00 | | 1.550.000,00 | | 1.600.000,00 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 | 115 | 1.438.000,00 | 120 | 1.450.000,00 | 125 | 1.500.000,00 | 130 | 1.550.000,00 | 135 | 1.600.000,00 | | |
| 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 6.185.500,00 | | 6.250.000,00 | | 6.350.000,00 | | 6.450.000,00 | | 6.550.000,00 | | |
| Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 3 | 0 | 6.185.500,00 | 0 | 6.250.000,00 | 0 | 6.350.000,00 | 0 | 6.450.000,00 | 0 | 6.550.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | |
| | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | |
| 5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | - | | - | | - | | - | | - | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | |
| 5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 2.680.500,00 | | 2.700.000,00 | | 2.750.000,00 | | 2.800.000,00 | | 2.850.000,00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 | 4 | 2.680.500,00 | 5 | 2.700.000,00 | 6 | 2.750.000,00 | 7 | 2.800.000,00 | 8 | 2.850.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 3.505.000,00 | | 3.550.000,00 | | 3.600.000,00 | | 3.650.000,00 | | 3.700.000,00 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 | 6 | 3.505.000,00 | 7 | 3.550.000,00 | 8 | 3.600.000,00 | 9 | 3.650.000,00 | 10 | 3.700.000,00 | | |
| 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 447.535.482,64 | | 582.306.833,00 | | 765.006.833,00 | | 1.018.606.833,00 | | 1.289.756.833,00 | | |
| Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 447.535.482,64 | 12 | 582.306.833,00 | 12 | 765.006.833,00 | 12 | 1.018.606.833,00 | 12 | 1.289.756.833,00 | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.351.700,00 | | 2.400.000,00 | | 2.450.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.550.000,00 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 2.351.700,00 | 12 | 2.400.000,00 | 12 | 2.450.000,00 | 12 | 2.500.000,00 | 12 | 2.550.000,00 | | |
| 5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 10.800.000,00 | | 1.810.000,00 | | 1.820.000,00 | | 1.830.000,00 | | 1.840.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 10.800.000,00 | 12 | 1.810.000,00 | 12 | 1.820.000,00 | 12 | 1.830.000,00 | 12 | 1.840.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 434.383.782,64 | | 578.096.833,00 | | 760.736.833,00 | | 1.014.276.833,00 | | 1.285.366.833,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 434.383.782,64 | 12 | 578.096.833,00 | 12 | 760.736.833,00 | 12 | 1.014.276.833,00 | 12 | 1.285.366.833,00 | | |
| 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 24.776.000,00 | | 24.950.000,00 | | 25.150.000,00 | | 25.350.000,00 | | 25.550.000,00 | | |
| Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 | 7 | 24.776.000,00 | 8 | 24.950.000,00 | 9 | 25.150.000,00 | 10 | 25.350.000,00 | 11 | 25.550.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 17.000.000,00 | | 17.050.000,00 | | 17.100.000,00 | | 17.150.000,00 | | 17.200.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 | 22 | 17.000.000,00 | 23 | 17.050.000,00 | 24 | 17.100.000,00 | 25 | 17.150.000,00 | 26 | 17.200.000,00 | 5.02.0.00.0.00 .04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 4.576.000,00 | | 4.600.000,00 | | 4.650.000,00 | | 4.700.000,00 | | 4.750.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 | 11 | 4.576.000,00 | 12 | 4.600.000,00 | 13 | 4.650.000,00 | 14 | 4.700.000,00 | 15 | 4.750.000,00 | | |
| 5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 2.350.000,00 | | 2.400.000,00 | | 2.450.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.550.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 | 7 | 2.350.000,00 | 8 | 2.400.000,00 | 9 | 2.450.000,00 | 10 | 2.500.000,00 | 11 | 2.550.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 850.000,00 | | 900.000,00 | | 950.000,00 | | 1.000.000,00 | | 1.050.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 | 1 | 850.000,00 | 1 | 900.000,00 | 1 | 950.000,00 | 1 | 1.000.000,00 | 1 | 1.050.000,00 | | |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 512.169.743.988,00 | | 527.857.845.229,00 | | 535.574.879.038,00 | | 548.807.600.131,00 | | 548.873.071.193,00 | | |
| Pencapaian Pengelolaan Keuangan ,penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan keuangan daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 87 | 92 | 512.169.743.988,00 | 94 | 527.857.845.229,00 | 96 | 535.574.879.038,00 | 98 | 548.807.600.131,00 | 100 | 548.873.071.193,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | 32.900.000,00 | | 34.800.000,00 | | 36.500.000,00 | | 38.500.000,00 | | 40.700.000,00 | | |
| Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD) | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | | 2 | 32.900.000,00 | 2 | 34.800.000,00 | 2 | 36.500.000,00 | 2 | 38.500.000,00 | 2 | 40.700.000,00 | | |
| | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | 4.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | |
| Tersusunnya KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 | 2 | 4.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 6.000.000,00 | 2 | 7.000.000,00 | 2 | 8.000.000,00 | | |
| 5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | 7.000.000,00 | | 7.200.000,00 | | 7.500.000,00 | | 8.000.000,00 | | 8.500.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | | 2 | 7.000.000,00 | 2 | 7.200.000,00 | 2 | 7.500.000,00 | 2 | 8.000.000,00 | 2 | 8.500.000,00 | | |
| 5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 8.000.000,00 | | 8.500.000,00 | | 8.700.000,00 | | 9.000.000,00 | | 9.500.000,00 | | |
| Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 | 2 | 8.000.000,00 | 2 | 8.500.000,00 | 2 | 8.700.000,00 | 2 | 9.000.000,00 | 2 | 9.500.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | 6.100.000,00 | | 6.200.000,00 | | 6.300.000,00 | | 6.400.000,00 | | 6.500.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 | 2 | 6.100.000,00 | 2 | 6.200.000,00 | 2 | 6.300.000,00 | 2 | 6.400.000,00 | 2 | 6.500.000,00 | | |
| 5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | 7.800.000,00 | | 7.900.000,00 | | 8.000.000,00 | | 8.100.000,00 | | 8.200.000,00 | | |
| Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 5 | 5 | 7.800.000,00 | 5 | 7.900.000,00 | 5 | 8.000.000,00 | 5 | 8.100.000,00 | 5 | 8.200.000,00 | | |
| 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | 27.120.000,00 | | 28.050.000,00 | | 28.780.000,00 | | 29.510.000,00 | | 30.240.000,00 | | |
| Persentase Realisasi Penyerapan Belanja APBD | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 162 | 164 | 27.120.000,00 | 165 | 28.050.000,00 | 166 | 28.780.000,00 | 167 | 29.510.000,00 | 168 | 30.240.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Aset Daerah | |
| | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 3 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 220 | 220 | | 220 | | 220 | | 220 | | 220 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | 5.000.000,00 | | 5.500.000,00 | | 6.000.000,00 | | 6.500.000,00 | | 7.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 | 12 | 5.000.000,00 | 12 | 5.500.000,00 | 12 | 6.000.000,00 | 12 | 6.500.000,00 | 12 | 7.000.000,00 | | |
| 5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | 1.700.000,00 | | 1.800.000,00 | | 1.900.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.100.000,00 | | |
| Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 220 | 220 | 1.700.000,00 | 220 | 1.800.000,00 | 220 | 1.900.000,00 | 220 | 2.000.000,00 | 220 | 2.100.000,00 | | |
| 5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | 9.000.000,00 | | 9.300.000,00 | | 9.400.000,00 | | 9.500.000,00 | | 9.600.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 2 | 2 | 9.000.000,00 | 2 | 9.300.000,00 | 2 | 9.400.000,00 | 2 | 9.500.000,00 | 2 | 9.600.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | 2.130.000,00 | | 2.140.000,00 | | 2.150.000,00 | | 2.160.000,00 | | 2.170.000,00 | | |
| Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 12 | 12 | 2.130.000,00 | 12 | 2.140.000,00 | 12 | 2.150.000,00 | 12 | 2.160.000,00 | 12 | 2.170.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | 1.770.000,00 | | 1.780.000,00 | | 1.790.000,00 | | 1.800.000,00 | | 1.810.000,00 | | |
| Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 3 | 5 | 1.770.000,00 | 6 | 1.780.000,00 | 7 | 1.790.000,00 | 8 | 1.800.000,00 | 9 | 1.810.000,00 | | |
| 5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 7.520.000,00 | | 7.530.000,00 | | 7.540.000,00 | | 7.550.000,00 | | 7.560.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 162 | 164 | 7.520.000,00 | 165 | 7.530.000,00 | 166 | 7.540.000,00 | 167 | 7.550.000,00 | 168 | 7.560.000,00 | | |
| 5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | 13.160.000,00 | | 13.470.000,00 | | 13.780.000,00 | | 14.090.000,00 | | 14.400.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosentase SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 2 | 2 | 13.160.000,00 | 2 | 13.470.000,00 | 2 | 13.780.000,00 | 2 | 14.090.000,00 | 2 | 14.400.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00<br>00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| 5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | 860.000,00 | | 870.000,00 | | 880.000,00 | | 890.000,00 | | 900.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 2 | 2 | 860.000,00 | 2 | 870.000,00 | 2 | 880.000,00 | 2 | 890.000,00 | 2 | 900.000,00 | | |
| 5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | 1.900.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.100.000,00 | | 2.200.000,00 | | 2.300.000,00 | | |
| Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 2 | 2 | 1.900.000,00 | 2 | 2.000.000,00 | 2 | 2.100.000,00 | 2 | 2.200.000,00 | 2 | 2.300.000,00 | | |
| 5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 2.600.000,00 | | 2.700.000,00 | | 2.800.000,00 | | 2.900.000,00 | | 3.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 6 | 6 | 2.600.000,00 | 6 | 2.700.000,00 | 6 | 2.800.000,00 | 6 | 2.900.000,00 | 6 | 3.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | 7.800.000,00 | | 7.900.000,00 | | 8.000.000,00 | | 8.100.000,00 | | 8.200.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 10 | 10 | 7.800.000,00 | 10 | 7.900.000,00 | 10 | 8.000.000,00 | 10 | 8.100.000,00 | 10 | 8.200.000,00 | | |
| 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 512.094.563.988,00 | | 527.779.525.229,00 | | 535.493.819.038,00 | | 548.723.500.131,00 | | 548.785.731.193,00 | | |
| Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga dan Dana Bagi Hasil | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 1 | 12 | 512.094.563.988,00 | 12 | 527.779.525.229,00 | 12 | 535.493.819.038,00 | 12 | 548.723.500.131,00 | 12 | 548.785.731.193,00 | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 325 | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | 483.668.908.988,00 | | 498.853.870.229,00 | | 506.068.164.038,00 | | 518.797.845.131,00 | | 518.360.076.193,00 | | |
| Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 325 | 70 | 483.668.908.988,00 | 71 | 498.853.870.229,00 | 72 | 506.068.164.038,00 | 73 | 518.797.845.131,00 | 74 | 518.360.076.193,00 | | |
| 5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | 10.000.000.000,00 | | 10.500.000.000,00 | | 11.000.000.000,00 | | 11.500.000.000,00 | | 12.000.000.000,00 | | |
| Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 | 3 | 10.000.000.000,00 | 4 | 10.500.000.000,00 | 5 | 11.000.000.000,00 | 6 | 11.500.000.000,00 | 7 | 12.000.000.000,00 | | |
| 5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | 18.425.655.000,00 | | 18.425.655.000,00 | | 18.425.655.000,00 | | 18.425.655.000,00 | | 18.425.655.000,00 | | |
| Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 1 | 12 | 18.425.655.000,00 | 12 | 18.425.655.000,00 | 12 | 18.425.655.000,00 | 12 | 18.425.655.000,00 | 12 | 18.425.655.000,00 | | |
| 5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | |
| Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 0 | 1 | 2.000.000,00 | 1 | 2.000.000,00 | 1 | 2.000.000,00 | 1 | 2.000.000,00 | 1 | 2.000.000,00 | | |
| 5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | | | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 0 | 1 | 2.000.000,00 | 1 | 2.000.000,00 | 1 | 2.000.000,00 | 1 | 2.000.000,00 | 1 | 2.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | 699.496.105,00 | | 707.300.000,00 | | 717.900.000,00 | | 732.600.000,00 | | 749.800.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkelolanya Barang Milik Daerah dengan tertib sesuai peraturan dan perundang undangan | Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA) | 80 | 82 | 699.496.105,00 | 84 | 707.300.000,00 | 86 | 717.900.000,00 | 88 | 732.600.000,00 | 90 | 749.800.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 699.496.105,00 | | 707.300.000,00 | | 717.900.000,00 | | 732.600.000,00 | | 749.800.000,00 | | |
| Prosentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundangundangan dan tepat waktu | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 500 | 5 | 699.496.105,00 | 6 | 707.300.000,00 | 7 | 717.900.000,00 | 8 | 732.600.000,00 | 9 | 749.800.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 87 | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | | |
| | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 87 | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 3 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 87 | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga | | | | 113.000.000,00 | | 113.000.000,00 | | 113.000.000,00 | | 113.000.000,00 | | 113.000.000,00 | | |
| Tersedianya Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 | 1 | 113.000.000,00 | 1 | 113.000.000,00 | 1 | 113.000.000,00 | 1 | 113.000.000,00 | 1 | 113.000.000,00 | | |
| 5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 32.000.000,00 | | 32.000.000,00 | | 32.000.000,00 | | 32.000.000,00 | | 32.000.000,00 | | |
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 87 | 87 | 32.000.000,00 | 87 | 32.000.000,00 | 87 | 32.000.000,00 | 87 | 32.000.000,00 | 87 | 32.000.000,00 | | |
| 5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 87 | 87 | 50.000.000,00 | 87 | 50.000.000,00 | 87 | 50.000.000,00 | 87 | 50.000.000,00 | 87 | 50.000.000,00 | | |
| 5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | 91.000.000,00 | | 91.000.000,00 | | 91.000.000,00 | | 91.000.000,00 | | 91.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 87 | 87 | 91.000.000,00 | 87 | 91.000.000,00 | 87 | 91.000.000,00 | 87 | 91.000.000,00 | 87 | 91.000.000,00 | | |
| 5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | 194.285.005,00 | | 202.088.900,00 | | 212.688.900,00 | | 227.388.900,00 | | 244.588.900,00 | | |
| Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 500 | 5 | 194.285.005,00 | 6 | 202.088.900,00 | 7 | 212.688.900,00 | 8 | 227.388.900,00 | 9 | 244.588.900,00 | | |
| 5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 3 | 5 | 50.000.000,00 | 6 | 50.000.000,00 | 7 | 50.000.000,00 | 8 | 50.000.000,00 | 9 | 50.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | KATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 169.211.100,00 | | 169.211.100,00 | | 169.211.100,00 | | 169.211.100,00 | | 169.211.100,00 | | |
| Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 6 | 6 | 169.211.100,00 | 6 | 169.211.100,00 | 6 | 169.211.100,00 | 6 | 169.211.100,00 | 6 | 169.211.100,00 | | |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 560.712.900,00 | | 567.000.000,00 | | 575.500.000,00 | | 587.300.000,00 | | 601.100.000,00 | | |
| Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1.2 | 1.4 | 560.712.900,00 | 1.5 | 567.000.000,00 | 1.6 | 575.500.000,00 | 1.7 | 587.300.000,00 | 1.8 | 601.100.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 560.712.900,00 | | 567.000.000,00 | | 575.500.000,00 | | 587.300.000,00 | | 601.100.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 4 | 6 | 560.712.900,00 | 7 | 567.000.000,00 | 8 | 575.500.000,00 | 9 | 587.300.000,00 | 10 | 601.100.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 50 | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | | |
| | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 24 | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | | |
| | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 11 | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | | |
| | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 616 | 616 | | 616 | | 616 | | 616 | | 616 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 50 | 70 | | 80 | | 90 | | 100 | | 110 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 24 | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | | |
| 5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 6.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 4 | 6 | 6.000.000,00 | 7 | 10.000.000,00 | 8 | 15.000.000,00 | 9 | 20.000.000,00 | 10 | 30.000.000,00 | | |
| 5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | 82.000.000,00 | | 85.000.000,00 | | 90.000.000,00 | | 95.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 50 | 70 | 82.000.000,00 | 80 | 85.000.000,00 | 90 | 90.000.000,00 | 100 | 95.000.000,00 | 110 | 100.000.000,00 | | |
| 5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | 6.500.000,00 | | 7.000.000,00 | | 7.500.000,00 | | 8.000.000,00 | | 8.500.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 50 | 60 | 6.500.000,00 | 65 | 7.000.000,00 | 70 | 7.500.000,00 | 75 | 8.000.000,00 | 80 | 8.500.000,00 | | |
| 5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | 108.000.000,00 | | 109.000.000,00 | | 110.000.000,00 | | 111.000.000,00 | | 112.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 616 | 616 | 108.000.000,00 | 616 | 109.000.000,00 | 616 | 110.000.000,00 | 616 | 111.000.000,00 | 616 | 112.000.000,00 | 5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 124.000.000,00 | | 125.000.000,00 | | 126.000.000,00 | | 127.000.000,00 | | 128.000.000,00 | | |
| Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 24 | 27 | 124.000.000,00 | 28 | 125.000.000,00 | 29 | 126.000.000,00 | 30 | 127.000.000,00 | 31 | 128.000.000,00 | | |
| 5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | 84.150.000,00 | | 84.150.000,00 | | 84.150.000,00 | | 84.150.000,00 | | 84.150.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 11 | 11 | 84.150.000,00 | 11 | 84.150.000,00 | 11 | 84.150.000,00 | 11 | 84.150.000,00 | 11 | 84.150.000,00 | |
| 5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 90.062.900,00 | | 81.850.000,00 | | 72.850.000,00 | | 67.150.000,00 | | 58.450.000,00 | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 100 | 100 | 90.062.900,00 | 100 | 81.850.000,00 | 100 | 72.850.000,00 | 100 | 67.150.000,00 | 100 | 58.450.000,00 | |
| 5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | 60.000.000,00 | | 65.000.000,00 | | 70.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 80.000.000,00 | |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 24 | 24 | 60.000.000,00 | 24 | 65.000.000,00 | 24 | 70.000.000,00 | 24 | 75.000.000,00 | 24 | 80.000.000,00 | |

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo memiliki rencana program yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, aset daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah. Program Kegiatan BPPKAD adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Kegiatannya meliputi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, penyediaan sarana prasarana perkantoran, serta pemeliharaan barang milik daerah. Fokusnya adalah memastikan ketersediaan dokumen perencanaan, laporan keuangan, gaji dan tunjangan ASN, serta dukungan operasional perangkat daerah yang memadai.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

   Program ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Subkegiatan meliputi koordinasi penyusunan APBD, pengelolaan kas daerah, rekonsiliasi data keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, hingga penyaluran bantuan keuangan. Target utamanya adalah tercapainya peningkatan capaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator naik hingga 100% pada akhir periode.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

   Kegiatan difokuskan pada tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Subkegiatan mencakup penyusunan standar harga, rencana kebutuhan BMD, penatausahaan aset, inventarisasi, pengamanan, penilaian, serta penghapusan atau pemindahtanganan. Indeks pengelolaan aset daerah (IPA) ditargetkan meningkat dari 80 menjadi 90 pada akhir periode.
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

   Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Subkegiatan meliputi penyediaan sarana prasarana pajak, pemutakhiran basis data pajak, penilaian NJOP, penetapan wajib pajak, pelayanan dan konsultasi pajak, penelitian dan verifikasi data, penagihan pajak, serta pembinaan retribusi. Target peningkatan PAD diproyeksikan bertahap setiap tahun dengan dukungan sistem administrasi perpajakan yang lebih baik.

**Table 19 - DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS**

**DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH - RANCANGAN AKHIR RENSTRA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah** | | | | |
| 1. | 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Pencapaian Pengelolaan Keuangan ,penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan keuangan daerah | 5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Program ini mendukung sasaran RPJMD Kabupten Probolinggo, yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah” |
| | | | 5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | |
| | | | 5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | |
| | | | 5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | |
| | | | 5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | |
| | | | 5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | |
| | | | 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | |
| | | | 5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | |
| | | | 5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | |
| | | | 5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | |
| | | | 5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | |
| | | | 5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | |
| | | | 5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | |
| | | | 5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | |
| | | | 5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan<br>APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | |
| | | | 5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | |
| | | | 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Mendukung program Bupati SAE GUS TUR, dengan insentif tambahan 100 juta tiap desa untuk infrastruktur jalan |
| | | | 5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | |
| | | | 5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | |
| | | | 5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | |
| 2. | 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Terkelolanya Barang Milik Daerah dengan tertib sesuai peraturan dan perundang undangan | 5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah | Program ini mendukung sasaran RPJMD Kabupten Probolinggo, yaitu “Meningkatnya |
| | | | 5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga | |
| | | | 5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | |
| | | | 5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah | |
| | | | 5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah | |
| | | | 5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah | Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah” |
| | | | 5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | |
| 3. | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Program ini mendukung program prioritas bupati /sub progam prioritas intensifikasi dan ekstensifikasi PAD |
| | | | 5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | |
| | | | 5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | |
| | | | 5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | |
| | | | 5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah | |
| | | | 5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | |
| | | | 5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | |
| | | | 5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah | |
| | | | 5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | |

**Subkegiatan Prioritas BPPKAD Kabupaten Probolinggo meliputi;**

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome dari program ini adalah tercapainya pengelolaan keuangan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan daerah yang baik.
   - Subkegiatan di bidang Anggaran meliputi koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan perubahan KUA-PPAS, serta penyusunan regulasi dan kebijakan anggaran.
   - Di bidang perbendaharaan, kegiatan meliputi koordinasi pengelolaan kas daerah, penyusunan dan pengendalian anggaran kas, rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas, penyusunan laporan realisasi kas, hingga pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah daerah.
   - Untuk Kegiatan Akuntansi dan pelaporan keuangan, meliputi Subkegiatan: rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Selain itu, ada konsolidasi laporan keuangan SKPD dan BLUD, serta penyusunan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
   - Di Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung program **SAE GUS-TUR** ada subkegiatan sebagai berikut: Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan subkegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Outcome yang diharapkan adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.
   - Subkegiatan antara lain penyusunan standar harga, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, dan penilaian aset daerah.
   - Selain itu, dilakukan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD untuk memastikan pemanfaatan aset secara efektif.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Outcome program ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
   - Subkegiatan meliputi penyediaan sarana-prasarana pengelolaan pajak daerah, pengolahan dan pemeliharaan basis data pajak, penilaian PBB-P2 dan BPHTB, serta penetapan wajib pajak daerah.

- Selain itu, terdapat kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak, penelitian dan verifikasi laporan pajak, penagihan pajak, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

**BPPKAD**

**Table 20 - INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) – BPPKAD**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| **I.** | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | | | | | | | | | Nama OPD |
| 1. | Indek Pengelolaan Keuangan aerah (IPKD) | Indeks | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | IKU (Tujuan) BPPKAD |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - **Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah** | | | | | | | | | Nama OPD |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Indikator Sasaran BPPKAD 1 |
| 2. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | Indikator Sasaran BPPKAD 2 |
| 3. | Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD | % | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | Indikator Sasaran BPPKAD 3 |
| 4. | Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Indikator Sasaran BPPKAD 4 |
| 5. | Prosentase Penyerapan Anggaran | % | 87 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 95 | Indikator Sasaran BPPKAD 5 |
| 6. | Fleksibilitas Keuangan | % | 2 | 2,02 | 2,05 | 2,07 | 2,09 | 2,15 | 2,19 | Indikator Sasaran BPfPKAD 6 |
| 7. | Solvabilitas Operasional | % | 81,8 | 81,9 | 82 | 82,1 | 82,2 | 82,3 | 82,4 | Indikator Sasaran BPPKAD 7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Persentase Penilaian Opini BPK | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Indikator Sasaran BPPKAD 8 |
| 9. | Solvabilitas Jangka Panjang | % | 0 | 15,69 | 7 | 51,63 | 290 | 84 | 101 | Indikator Sasaran BPPKAD 9 |
| 10. | Solvabilitas Layanan (Rp/org) | Rupiah/ Org | 2.286.321,23 | 2.301.246,61 | 2.488.165,39 | 2.330.768,19 | 2.198.595,71 | 2.086.263,17 | 1.989.822,11 | Indikator Sasaran BPPKAD 10 |
| 11. | Solvabilitas Jangka Pendek | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Indikator Sasaran BPPKAD 11 |
| 12. | Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Indeks | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | Indikator Sasaran BPPKAD 12 |

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) tahun anggaran 2025 – 2029 adalah **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah** (IPKD). IPKD adalah sebuah instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mengukur tingkat kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara objektif, terukur, dan komprehensif. IPKD bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil.Pengukuran IPKD didasarkan pada beberapa dimensi utama yang mencerminkan seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari;

1. Dimensi 1 tentang Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Dimensi 1 tentang Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD.
3. Dimensi 1 tentang Transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Dimensi 1 tentang Penyerapan Anggaran.
5. Dimensi 1 tentang Kondisi keuangan daerah.
6. Dimensi 1 tentang Opini BPK

Masing-masing dimensi ini memiliki indikator spesifik yang dievaluasi secara berkala untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan di suatu daerah. Target pencapaian IKU BPPKAD lima (5) tahun kedepan ditampilkan pada table diatas;

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

**BPPKAD**

**Table 21 - INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**

| NO | OPD | IKK | Satuan | Base Line 2024 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | BPPKAD | Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | % | 19.11 | 19.13 | 19.16 | 19.17 | 19.20 | 19.25 | 19.30 |
| 2 | BPPKAD | Rasio PAD | % | 14.22 | 16.31 | 17.33 | 18.35 | 19.37 | 20.00 | 20.39 |
| 3 | BPPKAD | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) | % | 82.71 | 80.35 | 79.75 | 78.50 | 77.30 | 76.05 | 75.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BPPKAD | Opini laporan keuangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | BPPKAD | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | % | 94.15 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 6 | BPPKAD | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | % | 103.76 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 |
| 7 | BPPKAD | Assets Management | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | BPPKAD | Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya | % | 6.34 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 9 | BPPKAD | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | % | 92.01 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 10 | BPPKAD | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) | % | 66.66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat strategis dan menjadi fondasi dalam pengelolaan administrasi negara maupun daerah. Dalam upaya memastikan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien, diperlukan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur utama untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan.

Indikator Kinerja Kunci Urusan Keuangan berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis dalam bidang keuangan, baik di tingkat

pusat maupun daerah. IKK ini digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan keuangan, termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Target Indikator Kinerja Kunci yang menjadi tanggungjawab BPPKAD Tahun Anggaran 2025 -2029 dapat disajikan dalam table diatas:

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Kabupaten Probolinggo berlaku selama lima tahun, dari tahun 2025 hingga 2029. BPPKAD termasuk dalam Tujuan RPJMD Kabupaten Probolinggo MISI 1: SAE PEMERINTAHAN, Tujuan RPJMD 1, yaitu; "Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional"dengan indicator tujuan adalah "Indek Reformasi Birokrasi. Dan Sasaran RPJMD nomor 1 yaitu: " Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah dengan indikator nomor 1.2 yaitu: Indek Pengelolaaan Keuangan Daerah (IPKD). Renstra BPPKAD Kabupaten Probolinggo merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis BPPKAD ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan BPPKAD sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Probolinggo.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo disusun sebagai pedoman dalam mengarahkan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Kaidah ini menekankan keterpaduan, konsistensi, serta kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, yang meliputi;

- Pertama, pelaksanaan Renstra BPPKAD harus berpedoman pada visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo. Setiap program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis daerah, khususnya dalam bidang

pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan daerah.

- Kedua, seluruh program dan kegiatan BPPKAD wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini mencakup perencanaan anggaran yang realistis, pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, serta pelaporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Ketiga, kaidah pelaksanaan Renstra juga mengedepankan koordinasi lintas perangkat daerah dan kerja sama dengan pihak terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun masyarakat. Sinergi ini penting agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah berjalan harmonis serta tidak tumpang tindih.
- Keempat, Renstra BPPKAD harus dilaksanakan secara fleksibel namun tetap konsisten, artinya mampu menyesuaikan dengan dinamika kebijakan nasional maupun perubahan kebutuhan daerah, tanpa mengabaikan arah strategis yang telah ditetapkan.
- Terakhir, keberhasilan pelaksanaan Renstra akan diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan, antara lain peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tertib administrasi aset daerah, serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik untuk memastikan tercapainya target yang telah direncanakan, sekaligus sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo dilaksanakan sebagai upaya memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta memberikan hasil yang nyata bagi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan daerah. Pengendalian dilakukan melalui;

1. Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Monitoring ini mencakup penilaian atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, ketepatan waktu, penggunaan anggaran, serta capaian indikator kinerja.
2. Mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah korektif.
3. Pengendalian manajemen dan pengawasan melekat (waskat) oleh pimpinan unit kerja.

4. Pengawasan Eksternal oleh tim Inspektorat Daerah maupun lembaga pemeriksa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kaidah pelaksanaan serta pengendalian Rencana Strategis (RENSTRA) BPPKAD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan Program Kegiatan dan Subkegiatan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Probolinggo**, **21 Agustus 2025**

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Probolinggo

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19730215 199302 2 002

# RENCANA STRATEGIS

## BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
## TAHUN 2025 - 2029

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**
**TAHUN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH
Jl. Raya P. Sudirman No.134 Kraksaan Telp. (0335) 846616 Fax. 846616
Website : www.bappeda.probolinggokab.go.id Email : bapeda.probolinggokab.go.id
KRAKSAAN-PROBOLINGGO 67282

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**
**NOMOR : 000.7.2/968/426.201/2025**

**TENTANG**

**TIM KERJA PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2045;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Tim Kerja Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkroniasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tetang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029; dan

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas;

1. Mengajukan data target dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Mengindetifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target Indikator periode lalu;
3. Melakukan telaah atas relevansi Indikator Kinerja Utama terhadap urusan yang ditangani Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
4. Melakukan reviu atas capaian kinerja periode Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 2025 (tahun berjalan);
5. Merumuskan target terhadap Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo berdasarkan Rencana Strategis dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 01 September 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

M. SJAIFUL EFFENDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690314 198908 1 002

Tembusan Yth:
Bupati Probolinggo

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : I
Keputusan Kepala Bapelitbangda
Kabupaten Probolinggo
Nomor : 000.7.2/98/426.201/2025
Tanggal : 01 September 2025
Tentang : Satuan Tim Kerja Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA | JABATAN DALAM INSTANSI |
|---|---|---|
| 1 | Penanggung Jawab | Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo |
| 2 | Ketua | Sekretaris Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo |
| 3 | Sekretaris | JF. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Bapelitbangda |
| 4 | Anggota | 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pegendalian, dan Evaluasi Pembanguna Daerah<br>2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia<br>3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam<br>4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan<br>5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah<br>6. Fungsional Perencana |

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 01 September 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

M. SJAIFUL EFFENDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690314 198908 1 002

Dipindai dengan CamScanner

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan tepat waktu. Rencana Strategis Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, hal ini sesuai yang diisyaratkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa semua Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra (Rencana Strategis). Rencana Strategis Bapelitbangdada Kabupaten Probolinggo pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan serta ide gagasan dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo ini. Dokumen Renstra Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat

menjadi dasar di dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, September 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,**
**PENELITIAN DAN**
**PENGEMBANGAN DAERAH**

**M. SJAIFUL EFENDI, S.Sos., M.Si**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19690314 198908 1 002**

# DAFTAR ISI


| | | Hal |
|---|---|---|
| KATA PENGANTAR | ..... | i |
| DAFTAR ISI | ..... | iii |
| DAFTAR TABEL | ..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR | ..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | ..... | I - 1 |
| 1.1 Latar Belakang | ..... | I - 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | ..... | I - 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | ..... | I - 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | ..... | I - 6 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | ..... | II - 1 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapelitbangda | ..... | II - 1 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | ..... | II - 9 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | ..... | II - 12 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | ..... | II - 16 |
| 2.4.1 Tantangan | ..... | II - 17 |
| 2.4.2 Peluang | ..... | II - 18 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | ..... | III - 1 |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran | ..... | III - 1 |
| 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan | ..... | III - 5 |
| BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | ..... | IV - 1 |
| 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan | ..... | IV - 1 |
| 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan | ..... | IV - 59 |
| BAB V PENUTUP | ..... | V - 1 |
| 5.1 Kaidah Pelaksanaan | ..... | V - 2 |
| 5.2 Pengendalian dan Evaluasi | ..... | V - 3 |

# DAFTAR TABEL


| | | Hal |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Jumlah Pegawai Bapelitbangda berdasarkan ..... Pangkat dan Golongan Tahun 2025 | II - 10 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Sarana Prasarana Bapelitbangda ..... Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 | II - 11 |
| Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbangda ..... Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024 | II - 14 |
| Tabel 2.4 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan ..... Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024 | II - 15 |
| Tabel 2.5 | Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah . | II - 20 |
| Tabel 3.1 | Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Resntra ..... Bapelitbangda | III - 2 |
| Tabel 3.3 | Penahapan Renstra Bapelitbangda ..... | III - 6 |
| Tabel 3.3 | Teknik Perumusan Arah Kebijakan Renstra ..... Bapelitbangda | III - 7 |
| Tabel 4.1 | Teknik Merumuskan Program/Kegiatan ..... /Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 | IV - 2 |
| Tabel 4.2 | Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ..... dan Pendanaan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 | IV- 26 |
| Tabel 4.3 | Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung ..... Program Prioritas Pembangunan Rancangan Akhir Renstra Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 | IV - 53 |
| Tabel 4.4 | Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir ..... Renstra Bapelitbangda | IV - 59 |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir ..... Renstra Bapelitbangda | IV - 61 |

# DAFTAR GAMBAR


| | | Hal |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo ..... | II - 9 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders), politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Sedangkan RENSTRA Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Derah hingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang juga disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun."

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu "Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025-2029 dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris) dan Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi) pada tanggal 20 Februari 2025, maka dokumen Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) 2024-2026 perlu disesuaikan lagi dengan muatan visi, misi, dan komitmen politik dan arah pembangunan sesuai RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Bapelitbangda 2025–2029 diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek Pembangunan, terutama pada urusan penunjang pemerintahan perencanaan dan kelitbangan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Renstra Bapelitbangda Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama (lima) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat Kabupaten dengan perangkat daerah serta antara dokumen perencanaan lima tahunan dengan dokumen tahunan. Pada tahap yang lebih operasional Renstra Bapelitbangda akan diacu dan dipedomani dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Bapelitbangda selama tahun 2025-2029.

Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Bapelitbangda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik

sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Renstra Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo selain mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, RTRW, KLHS RPJMD, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam Renstra PD 2025-2029.

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renstra Bapelitbangda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868)
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
40. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

41. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E);

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bapelitbangda dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bapelitbangda secara berkesinambungan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah:

a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 5 tahun, yaitu periode 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda;
b. Menjadi kerangka dasar bagi Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025–2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Bapelitbangda;
c. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo secara sistematis dan terorganisir, di antaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
d. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapelitbangda
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapelitbangda

Sesuai Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bapelitbangda memiliki peran sebagai unsur penunjang Urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

a) Kepala Badan;
b) Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
d) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
e) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
g) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
h) Kelompok Jabatan Fungsional;
i) UPT.

Fungsi dan tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut :

**1) Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
d. pembinaan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
e. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2) Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;

d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.

   Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

   1. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
   2. pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
   3. penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
   4. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   5. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
   6. penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
   7. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
2. pengelolaan administrasi keuangan;
3. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
4. penyiapan bahan verifikasi dan pembukuan;
5. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan /anggaran / data dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran / data dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program / kegiatan / anggaran data serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**3) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan meliputi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perhubungan dan Urusan Kominfo;

b. pengoordinasian, sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
c. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
d. penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
e. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4) **Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia** mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, meliputi urusan pendidikan, Kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adminsitrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan serta perpustakaan;

b. pengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;
c. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
e. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5) **Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam** mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam, meliputi urusan tenaga kerja, pangan, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian;
b. pengoordinasian, sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;

c. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
e. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6) **Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kinerja pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
b. perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang analisa data, informasi dan pelaporan kinerja pembangunan;
c. pengoordinasian, sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;
d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

e. penyiapan bahan evaluasi terhadap RPJPD, RPJMD dan fasilitasi terhadap RKPD;
f. penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan Perangkat Daerah lingkup Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
g. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

7) **Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah** mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, penelitian, pengembangan, penerapan dan perekayasaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penerapan dan perekayasaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan Infratsruktur dan Kewilayahan;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penerapan dan perekayasaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penerapan dan perekayasaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
d. penyiapan bahan, pengoordinasian dan pengembangan inovasi daerah, jaringan penelitian, fasilitasi penelitian unggulan daerah dan penyebarluasan hasil kelitbangan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**8) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan sesuai dengan keahlian.

Adapun bagan struktur organisasi Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo dapat dilihat di bawah ini :

**Gambar 1.1**
**Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo**

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Status kepegawaian di Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 terdiri atas :

- PNS : 34 Orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja : 10 Orang

Jumlah pegawai yang menduduki **Jabatan Struktural** sebanyak 9 orang, Jabatan Fungsional sebanyak 26 orang dan sebagai staf pelaksana sebanyak 9 orang. Jabatan struktural ini terdiri dari:

- Kepala Bapelitbangda / Eselon IIb : 1 orang
- Sekretaris / Eselon IIIa : 1 orang
- Kabid / Eselon IIIb : 5 orang
- Kasubag/Kasubid/ Eselon IVa : 2 orang

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1.**
**Jumlah Pegawai Bapelitbangda Berdasarkan Pangkat dan Golongan**
**Tahun 2025**

| NO | PANGKAT/GOL | JENIS KELAMIN | | JUMLAH (Orang) |
|---|---|---|---|---|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | Pengatur / II/c | - | - | 0 |
| 2 | Pengatur Tk. I / II/d | 3 | - | 3 |
| 3 | Penata Muda / III/a | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Penata Muda Tk I / III/b | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Penata / III/c | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Penata Tk. I / III/d | 3 | 6 | 9 |
| 7 | Pembina / IV/a | 3 | 5 | 8 |
| 8 | Pembina Tk. I / IV/b | - | - | 0 |
| 9 | Pembina Utama Muda / IV/c | 1 | - | 1 |
| 10 | Kelas X | - | - | 0 |
| 11 | Kelas IX | 4 | 4 | 8 |
| 12 | Kelas VIII | - | - | 0 |
| 13 | Kelas VII | 2 | - | 2 |

*Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2025*

Berdasarkan tingkat pendidikannya, SDM di Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo terdiri atas :

- Lulusan SMA/SMK : 4 orang
- Diploma : 2 orang
- Lulusan S1 : 20 orang
- Lulusan S2 : 18 orang

Untuk menyelenggarakan tugas pokok fungsi Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**
**Jumlah Sarana Prasarana**
**Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo**
**Tahun 2025**

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1 | Kendaraan Bermotor Beroda Empat | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 9 | 9 | 0 |
| 3 | Global Positioning System | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Rak-Rak Penyimpan | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Lemari Penyimpan | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Mesin Hitung Manual | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Lemari Besi/Metal | 13 | 12 | 1 |
| 10 | Lemari Kayu | 16 | 15 | 1 |
| 11 | Rak Besi | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Rak Kayu | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Filing Cabinet Besi | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Filing Cabinet Kayu | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Peti Uang/Cash Box/Coin Box | 1 | 0 | 1 |
| 16 | CCTV - Camera Control Television System | 2 | 1 | 1 |
| 17 | White Board | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Alat Penghancur Kertas | 3 | 3 | 0 |
| 19 | Mesin Absensi | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Laser Pointer | 2 | 0 | 2 |
| 21 | LCD Projector/Infocus | 3 | 3 | 0 |
| 22 | Brand Kas | 32 | 0 | 32 |
| 23 | Meja Kerja Kayu | 12 | 12 | 0 |
| 24 | Meja Rapat | 4 | 4 | 0 |
| 25 | Kursi Rapat | 8 | 8 | 0 |
| 26 | Kursi Lipat | 51 | 26 | 25 |
| 27 | Sofa | 6 | 6 | 0 |
| 28 | Filling Besi/Metal | 6 | 1 | 5 |
| 29 | Lemari Es | 2 | 1 | 1 |
| 30 | Kompor Listrik (Alat Dapur) | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Teko Listrik | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Kitchen Set | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Rak Piring Alumunium | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Televisi | 4 | 3 | 1 |
| 35 | Sound System | 4 | 3 | 1 |
| 36 | Wireless | 3 | 0 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Dispenser | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Handy Cam | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Karpet | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Gordyin/Kray | 2 | 2 | 0 |
| 41 | Handtruck Troly Plastics | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Meja Tamu Biasa | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Kursi Kerja | 88 | 55 | 33 |
| 47 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II | 2 | 2 | 0 |
| 48 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 6 | 6 | 0 |
| 49 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 8 | 8 | 0 |
| 50 | Proyektor + Attachment | 2 | 2 | 0 |
| 51 | Camera Electronic | 4 | 2 | 2 |
| 52 | Camera Film | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Camera Film (Drone Dji Mavic | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Lensa Kamera | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Layar Film/Projector | 4 | 4 | 0 |
| 56 | Video Conference | 4 | 3 | 1 |
| 57 | Telephone Mobile | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Facsimile | 3 | 1 | 2 |
| 59 | Local Area Network (LAN) | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Internet | 2 | 0 | 2 |
| 61 | P.C Unit | 31 | 29 | 2 |
| 62 | Lap Top | 48 | 42 | 6 |
| 63 | Note Book | 2 | 2 | 0 |
| 64 | Peralatan Personal Komputer (PC All In One) | 2 | 2 | 0 |
| 65 | Hard Disk | 11 | 4 | 7 |
| 66 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 4 | 0 | 4 |
| 67 | Monitor | 3 | 0 | 3 |
| 68 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 41 | 35 | 6 |
| 69 | External/ Portable Hardisk | 29 | 4 | 25 |

*Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2025*

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo pada periode Renstra sebelumnya (2024 – 2026). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Bapelitbangda pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam

periode Renstra yang sama. Tabel berikut menunjukan capaian kinerja Bapelitbangda selama periode 2024-2026. Dalam semua sasaran dan program yang direncanakan, tingkat capaian kinerja Bapelitbangda selama periode 2024-2026 ada yang melampaui target diatas 100%, namun ada satu indikator yang belum memenuhi target yaitu dari aspek pengukuran.

Namun demikian, jika dicermati pada tabel selanjutnya, yaitu yang terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio realisasi sekitar 100% yaitu mencapai rata-rata 90%. Hal ini berarti bahwa Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2024-2026 secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan anggaran minimal dapat dicapai hasil yang maksimal.

## Tabel 2.3
## Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Nilai capaian aspek perencanaan dan pengukuran kinerja PD : | | | | | | | | | | |
| | - Aspek Perencanaan | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | | 29,50 | 29,30 | 27,45 | 28,00 | |
| | - Aspek Pengukuran | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | | 22,74 | 24,60 | 21,92 | 22,52 | |
| 2 | Prosentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | | 35,00 | 35,00 | 44,60 | 57,14 | |
| 3 | Nilai SAKIP PD | 77,00 | 79,00 | 81,00 | 81,00 | | 72,81 | 75,77 | 77,45 | 78,05 | |
| 4 | Nilai capaian aspek perencanaan dan pengukuran kinerja PD : | | | | | | | | | | |
| | - Aspek Perencanaan | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - | - | 23,39 |
| | - Aspek Pengukuran | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | 19,48 |
| 5 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | - | - | - | - | 42,50 | - | - | - | - | 56,92 |
| 6 | Persentase kenaikan nilai LHE AKIP | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - | - | 1,29 |

# Tabel 2.4
# Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo
# Tahun 2020-2024

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.221.054.450 | | | | | 1.167.031.729 | | | | |
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 274.306.000 | | | | | 161.597.080 | | | | |
| Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | 1.293.865.500 | | | | | 1.152.438.653 | | | | |
| Program Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Bidang Ekonomi | 1.039.266.500 | | | | | 964.547.650 | | | | |
| Program Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Bidang Sosial Buday a dan Pemerintahan | 783.598.000 | | | | | 757.190.900 | | | | |
| Program Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | 892.284.900 | | | | | 870.312.750 | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - | 6.220.510.848 | 7.355.750.908 | 7.097.512.088 | 8.155.577.425 | - | 5.708.568.073 | 6.799.925.867 | 6.543.392.079 | 7.425.690.630 |
| Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | - | 1.250.446.000 | 1.469.600.000 | 1.083.259.700 | 959.960.000 | - | 957.615.703 | 1.392.700.132 | 1.011.438.888 | 880.123.513 |
| Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | - | 3.768.637.920 | 3.275.838.000 | 1.948.969.907 | 1.065.585.000 | - | 2.899.418.063 | .002.107.058 | 1.862.108.157 | 1.020.118.895 |
| Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | - | 389.750.000 | 793.700.000 | 1.214.162.000 | 1.039.340.000 | - | 244.988.500 | 42.381.200 | 1.180.318.320 | 935.652.488 |
| Program Riset dan Inovasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bapelitbangda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bapelitbangda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bapelitbangda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Fungsi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal maupun eksternal Bapelitbangda yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Probolinggo. Terwujudnya kondisi ke depan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karenanya, Bapelitbangda harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional. Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bapelitbangda harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah

dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun ekternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah tentunya ada tantangan dan peluang yang akan dihadapi.

### 2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Bapelitbangda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

a. Pencapaian target belum maksimal disebabkan belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan sehingga perlu ditingkatkan koordinasi dalam sinkronisasi antar dokumen perencanaan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun dengan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
b. Belum optimalnya koordinasi dalam sinkronisasi perencanaan program pembangunan dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau instansi lain dalam mengimplementasikan program pembangunan;
c. Perubahan struktur organisasi dan penataan kelembagaan beserta sumber daya manusia pendukung kegiatan masih memerlukan penataan peran yang lebih baik dan saling mengisi secara aktif; dan
d. Penentuan Program prioritas dengan menyesuaikan kemampuan fiskal.

### 2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Bapelitbangda dalam melaksanakan ketugasannya adalah:

a. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat;
b. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah melalui diklat, bimbingan teknis, *focus group discussion*, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah;
c. Partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan *stakeholder* lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah memungkinkan adanya feedback dalam rangka perbaikan produk perencanaan yang lebih partisipatif;
d. Penataan Sumber Daya Manusia melalui keikutsertaan uji kompetensi dan pelatihan bisa memaksimalkan peran dan potensi setiap personil.

## 2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bapelitbangda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan di daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Eksistensi Bapelitbangda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran institusi perencana baik di tingkat pusat maupun didaerah. Keberadaan sumberdaya yang meliputi sumber daya manusia (SDM) maupun sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

a. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
b. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
c. Tersedianya hasil-hasil kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan program, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Probolinggo, salah satu permasalahan makro daerah yang perlu mendapat perhatian yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan. Bapelitbangda adalah salah satu perangkat daerah yang tugas dan fungsi sebagainya pengampu penanganan di bidang tata kelola pemerintahan mengalami permasalahan sebagai berikut :

a. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
b. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu;

c. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang harus ditampung dan diperhatikan;
d. Masih rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan;
e. Kurang terfasilitasinya hasil temuan / inovasi.

## 2.6 Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama atau faktor kunci yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi/pemerintah pada masa mendatang. Isu strategis dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dan dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Berikut isu-isu strategis pada Bapelitbangda yang disajikan pada table dibawah ini:

**Tabel 2.5 Teknik Menyimpulkan lsu Strategis PD**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal dengan fokus permasalahan pada perlunya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan peningkatan nilai SAKIP khususnya pada komponen perencanaan dan komponen pengukuran | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Meningkatkan kualitas perencanaan daerah melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor, melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja |
| | | | | | | Peningkatan pemanfaatan hasil inovasi dan riset daerah |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2025 -2029. Badan Perencanan, Penelitian dan Pengembangan Daerah masuk dalam tujuan ke-1 yaitu "***Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional"*** dengan sasaran ke 1 dan 3, sasaran 1 yaitu ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah",*** dan sasaran ke 3 yaitu ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***

Tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo akan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut Tujuan dan Sasaran Renstra Bapelitbangda sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

## TABEL 3.1
## TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPELITBANGDA

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah<br>- Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah dan Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif | | Indeks Inovasi Daerah (Angka) | Indeks | 48,55 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| | | | Nilai SAKIP (Nilai) | Nilai | 67,11 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | Persen | 2,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan (Nilai) | Nilai | 23,39 | 23,55 | 23,71 | 23,88 | 24,05 | 24,22 | 24,38 |
| | | | Nilai SAKIP Komponen Pengukuran (Nilai) | Nilai | 19,48 | 19,53 | 19,67 | 19,81 | 19,94 | 20,08 | 20,22 |
| | | Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Inovasi Daerah | Persentase Inovasi yang berkualitas (Kematangan) (%) | Persen | 0,26 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 |

*Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline*

Dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Bapelitbangda memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP. Pada tujuan ini, terdapat 2 (dua) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Komponen Pengukuran Kinerja; dan
   b. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dengan indikator Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah.
2. Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif dengan indikator Indeks Inovasi Daerah. Selanjutnya, sasaran pada tujuan ini yaitu Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Inovasi Daerah dengan indikator Persentase Inovasi yang berkualitas (Kematangan).

Adapun rincian Definisi Operasional dan perhitungan capaian tujuan dan sasaran dikemukakan pada tabel dibawah ini :

| NO | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | Definisi Operasional Indikator Tujuan | Formula Perhitungan Indikator Tujuan | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN | Definisi Operasional Indikator Sasaran | Formula Perhitungan Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah | Nilai SAKIP | Hasil penjumlahan dari 4 komponen yang penilaian dari Kemenpan RB yaitu: Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja | Hasil penilaian Evaluasi AKIP Pemda dari KemenPAN (Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja) | 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Nilai LHE AKIP Komponen perencanaan dan komponen pengukuran | Hasil penjumlahan dari 2 komponen yang penilaian dari Kemenpan RB yatu: komponen Perencanaan kinerja dan komponen Pengukuran Kinerja | Hasil penilaian Evaluasi AKIP Pemda dari KemenPAN Komponen Perencanaan kinerja dan Komponen Pengukuran Kinerja |
| | | | | | 2 Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan Nilai LHE AKIP | Prosentase kenaikan nilai LHE AKIP berdasarkan hasil penilaian inspektorat meliputi komponen perencanaan, komponen pengukuran, komponen pelaporan kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas kinerja | (Nilai LHE AKIP PD tahun ini dikurangi Nilai LHE AKIP PD tahun lalu) dibagi Nilai LHE AKIP PD tahun lalu dikali 100 |
| 2 | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Indeks Inovasi Daerah | Nilai komposit yang menggambarkan tingkat inovasi daerah berdasarkan input, proses, dan output yang dinilai oleh Kemendagri | Nilai resmi yang dirilis oleh Kemendagri berdasarkan instrumen penilaian nasional | Meningkatnya jumlah dan kualitas inovasi daerah | Prosentase Inovasi yang berkualitas (Kematangan) | Prosentase Jumlah Inovasi dengan Tingkat Kematangan ≥70 | (Jumlah Inovasi dengan tingkat kematangan ≥70 / Total jumlah inovasi) × 100% |

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan tugas dan fungsinya. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi perangkat daerah.

Dalam penentuan strategi dan arah kebijakan ini, juga diperlukan pemetaan tahapan yang ingin dicapai setiap tahunnya. Penatahapan ini sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Untuk penahapan Renstra Bapelitbangda 2025-2029 dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**TABEL 3.2**
**PENAHAPAN RENSTRA BAPELITBANGDA**

| TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | TAHAP V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Penguatan pondasi layanan perencanaan, penelitian, dan pembangunan daerah. Penetapan baseline data, indikator kinerja, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas sebagai landasan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. | Percepatan penguatan pondasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan, disertai transformasi sosial-ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. | Pemantapan transformasi sosial-ekonomi melalui tata kelola pemerintahan responsif, bersih, dan akuntabel serta pelayanan publik yang inovatif. | Implementasi tata kelola pemerintahan yang efektif melalui dokumen perencanaan pembangunan berkualitas serta penyelenggaraan pelayanan publik yang inovatif. | Perwujudan transformasi sosial-ekonomi berkelanjutan dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik modern, inklusif, serta ditopang perencanaan pembangunan yang berbasis data dan berkualitas. |

Sementara itu, arah kebijakan pembangunan merupakan landasan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang akan dilaksanakan sepanjang periode perencanaan. Arah kebijakan dirancang untuk memastikan adanya kesinambungan antar tahapan pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Arah kebijakan menjelaskan bagaimana implementasi strategi pembangunan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah.

Arah kebijakan disusun berdasarkan Sasaran Pokok dalam Rencana Strategis (RESNTRA) Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029.:

**Tabel 3.3**

**TEKNIK PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPELITBANGDA**

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah | Sinkronisasi dan integrasi substansi perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan daerah lainnya | 1. Meningkatkan keterpaduan perencanaan secara vertikal dan horizontal, sehingga program dan kegiatan pembangunan lebih efektif, efisien, terarah, dan tidak tumpang tindih<br>2. Menyusun dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang selaras dan konsisten<br>3. Mewujudkan keterpaduan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam satu kawasan atau wilayah pengembangan melalui kerja sama antardaerah (KAD) untuk pembangunan infrastruktur lintas batas, kawasan industri, pariwisata, atau layanan dasar | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan, pembangunan | 1. Memperkuat forum koordinasi pembangunan seperti Musrenbang, Rakortek, dan forum lintas sektor dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor dalam penyusunan rencana pembangunan daerah<br>2. Pemberdayaan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan wilayah<br>3. Menerapkan prinsip perencanaan yang inklusif, transparan, responsif dan berdaya bagi masyarakat | |
| | | Menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung teknologi informasi yang inovatif untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan publik | 1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah melalui Digitalisasi layanan publik (e-government)<br>2. Mendorong inovasi dalam penyediaan layanan publik berbasis teknologi sesuai kebutuhan masyarakat<br>3. Mengoptimalkan penggunaan data digital untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan serta mendorong keterbukaan informasi dan partisipasi publik melalui platform digital | |

Dengan disusunnya strategi dan arah kebijakan serta penahapan perencanaan setiap tahunnya, diharapkan pelaksanaan tujuan dan sasaran Renstra Bapelitbangda 2025-2029 dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditentukan.

# BAB IV
# RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program PD merupakan program-program yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD, dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bapelitbangda maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1 dan tabel 4.2 Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah.

# TABEL 4.1
# TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
# RANCANGAN AKHIR RENSTRA
# BAPELITBANGDA KABUPATEN PROBOLINGGO

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** | | | | | | | |
| - Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah<br>- Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah dan Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif | | | | Nilai SAKIP (Nilai) | | |
| | | | | | Indeks Inovasi Daerah (Angka) | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | | | Nilai SAKIP Komponen perencanaan dan komponen pengukuran | | |
| | | | **Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah** | | **Prosentase kinerja tujuan dan sasaran PD yang telah mencapai nilai >80%** | **5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | |
| | | | | tersusunnya dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD | Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang disusun | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik | |
| | | | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Daerah/Lintas Perangkat Daerah | |
| | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | |
| | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD / RKPD) | 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | |
| tersedianya kebutuhan data dan informasi pemerintahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan | Jumlah data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang dihimpun | 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| Tersusunnya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun | Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | |
| | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersusunnya Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang terimplementasi ke dalam SIPD | Jumlah Dokumen perencanaan yang terimplementasikan dalam SIPD | 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | |
| | | | | **keselarasan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah** | | **Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan perencanaan daerah** | **5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | |
| | | | | | Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) | 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Daerah Bidang Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) | 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | |
| | | | | Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang | Jumlah dokumen perencanaan PD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Perekonomian dan SDA yang selaras dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) | 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) | 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | |
| | | | | Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang selaras dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan PD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) | 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir | 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) | Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | | Prosentase Kenaikan Nilai LHE AKIP | | |
| | | **Peningkatan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah** | | | **Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah** | **5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | Tersusunnya dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 5.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| | | | | Prosentase tingkat pemenuhan administrasi umum | Prosentase pemenuhan administrasi umum PD | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Prosentase tingkat pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang PD | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 5.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | |
| | | Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Inovasi Daerah | | | Persentase Inovasi yang berkualitas (Kematangan) (%) | | |
| | | | **1. Meningkatnya Hasil litbang yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, program atau regulasi daerah** | | **1. Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah** | **5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | |
| | | | | Tersusunnnya dokumen hasil litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang berkualitas | Jumlah Hasil Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun | 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | |
| | | | | Meningkatnya Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, program atau regulasi daerah | Jumlah Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun | 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | |
| | | | | Meningkatnya Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, program atau regulasi daerah | Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun | 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | | **2. Meningkatnya Hasil Inovasi yang Diterapkan Secara Berkelanjutan** | | **2. Persentase Peningkatan Hasil Inovasi yang Diimplementasikan Secara Berkelanjutan** | | |
| | | | | terlaksananya hasil Inovasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan | Persentase usulan Inovasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan | 5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen) | 5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan) | 5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan) | 5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan) | 5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | |
| | | | **Meningkatnya Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan** | | **Persentase Produk Riset dan Inovasi yang Diimplementasikan (%)** | **5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** | |
| | | | | Jumlah hasil Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | 5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah) | 5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan) | 5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan) | 5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | |
| | | | | | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen) | 5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | |
| | | | | Jumlah hasil kegiatan penelitian yang menghasilkan temuan baru berupa teknologi, metode, atau desain sistem yang belum pernah ada sebelumnya, dan segala bentuk pembaruan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas. | Jumlah Invensi dan Inovasi Daerah yang Dihasilkan | 5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan) | 5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan) | 5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | |
| Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan) | 5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | |
| Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan) | 5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | |
| Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan) | 5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | |
| Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan) | 5.05.03.2.02.0014 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah | |
| Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan) | 5.05.03.2.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi | |
| Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan) | 5.05.03.2.02.0025 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset (Laporan) | 5.05.03.2.02.0026 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset | |

## URAIAN DEVINISI OPERASIONAL DAN FORMULA
## PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BAPELITBANGDA KABUPATEN PROBOLINGGO

| NO | PROGRAM | DEVINISI OPERASIONAL | FORMULA | KEGIATAN | DEVINISI OPERASIONAL | FORMULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang tercapai target kinerja tujuan dan sasaran sesuai dokumen perencanaan | Jumlah Perangkat Daerah yang tercapai target kinerja tujuan dan sasaran sesuai dokumen perencanaan dibagi Total jumlah Perangkat Daerah dikalikan 100 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun (RPJPD, RPJMD dan RKPD) berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 | jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun |
| | | | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang dihimpun | Jumlah data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang dihimpun |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun | Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun |
| | | | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah tersusunnya Dokumen perencanaan seluruh Perangkat Daerah yang terimplementasikan dalam SIPD | Jumlah Dokumen perencanaan seluruh Perangkat Daerah yang terimplementasikan dalam SIPD |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dengan Perencanaan Daerah | jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg selaras dibagi jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dikali 100% | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah | jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan dokumen perencanaan Daerah |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan PD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja, dan Renja Perubahan) | jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan dokumen perencanaan Daerah (Renstra, Renja, dan Renja Perubahan) |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan PD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah | jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang selaras dengan dokumen perencanaan Daerah |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | Hasil penjumlahan dari 4 komponen penilaian dari Inspektorat yaitu: komponen Perencanaan kinerja, komponen Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Jumlah nilai dari komponen Perencanaan kinerja, komponen Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Kegiatan tahunan dan lima tahunan, dokumen perencanaan anggaran tahunan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tribulanan dan tahunan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan PD yang meliputi laporan pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan, laporan akuntasi SKPD, LaporanKeuangan Bulanan dan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang meliputi laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan laporan penatausahaan barang yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan meliputi Pendataan dan Pengolahan administrasi, laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta jumlah ASN yang didelegasian mengikuti pelatihan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan yang bersifat umum pada Perangkat Daerah guna menunjang peningkatkan kinerja meliputi penyediaan ATK, Sarana dukung kearsipan, kebutuhan logistik kantor dan lainnya serta pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum yang Terealisasi dibagi Jumlah Rencana Kegiatan kali 100 |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Pengadaan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Pengadaan BMD dibagi dengan jumlah BMD yang sesuai RKBMD kali 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan penyediaan jasa penunjang PD meliputi jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik serta Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang PD |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan | (∑hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti PD/∑Total penelitian/kajian yang disusun)x100% | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Hasil Penelitian/Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun | Jumlah Hasil Penelitian/Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial | Jumlah Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun | Jumlah Hasil Penelitian/Kajian Bidang Sosial dan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dan Kependudukan | | Kependudukan yang disusun |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun | Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun |
| | | Persentase peningkatan Inovasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan (minimal telah dilaksanakan selama 1 tahun) | (∑inovasi yang diterapkan berkelanjutan tahun ini - ∑inovasi yang diterapkan berkelanjutan tahun lalu)/∑inovasi yang diterapkan berkelanjutan tahun lalu x100% | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase usulan Inovasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan (minimal telah dilaksanakan selama 1 tahun) | (∑inovasi yang dapat diterapkan dan dilanjutkan/∑Total jumlah inovasi yang tercipta)x100% |
| 5 | Riset dan Inovasi Daerah | Persentase Produk Inovasi yang Diimplementasikan secara keberlanjutan oleh masyarakat | Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan dan Diterapkan secara keberlanjutan Dibagi Jumlah | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Jumlah Dokumen Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inovasi yang dihasilkan kali 100 | | | |
| | | | | Invensi dan Inovasi | Jumlah hasil kegiatan penelitian yang menghasilkan temuan baru berupa teknologi, metode, atau desain sistem yang belum pernah ada sebelumnya, dan segala bentuk pembaruan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas. | Jumlah hasil kegiatan penelitian yang menghasilkan temuan baru berupa teknologi, metode, atau desain sistem yang belum pernah ada sebelumnya, dan segala bentuk pembaruan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas. |

# TABEL 4.2
# RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
# BAPELITBANGDA KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT) | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 5.01 - PERENCANAAN | | | | | | 7.564.998.903,33 | | 7.649.200.000 | | 7.763.400.000 | | 7.921.900.000 | | 8.107.800.000 | | |
| 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kinerja tujuan dan sasaran PD yang telah mencapai nilai > 80% | 83.97 | 84 | 705.634.000 | 86 | 300.000.000 | 87 | 303.400.000 | 88 | 308.000.000 | 89 | 314.300.000 | 90 | 321.700.000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| 5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang disusun | 3 | 8 | 650.374.000 | 8 | 251.500.000 | 8 | 254.900.000 | 8 | 259.500.000 | 8 | 261.500.000 | 8 | 268.200.000 | | |
| 5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 3 | 2 | 54.740.000 | 1 | 28.585.000 | 1 | 28.585.000 | 1 | 28.585.000 | 2 | 28.585.000 | 2 | 28.585.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 3 | 2 | 57.250.000 | 1 | 35.750.000 | 1 | 35.750.000 | 1 | 35.750.000 | 2 | 35.750.000 | 2 | 35.750.000 | |
| 5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 | 55 | 19.800.000 | 60 | 15.000.000 | 60 | 15.000.000 | 60 | 15.000.000 | 60 | 15.000.000 | 60 | 15.000.000 | |
| 5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 | 2 | 57.540.000 | 1 | 35.750.000 | 1 | 35.750.000 | 1 | 35.750.000 | 1 | 35.750.000 | 2 | 37.450.000 | |
| 5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 240 | 240 | 7.100.000 | 240 | 14.000.000 | 240 | 14.000.000 | 240 | 14.000.000 | 240 | 14.000.000 | 240 | 14.000.000 | |
| 5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 3 | 3 | 453.944.000 | 2 | 122.415.000,00 | 2 | 125.815.000 | 2 | 130.415.000 | 2 | 132.415.000 | 3 | 137.415.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 15 | 15 | 27.180.000 | 15 | 18.000.000 | 15 | 18.000.000 | 15 | 18.000.000 | 15 | 18.000.000 | 15 | 18.000.000 | | |
| 5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 15 | 15 | 27.180.000 | 15 | 18.000.000 | 15 | 18.000.000 | 15 | 18.000.000 | 15 | 18.000.000 | 15 | 18.000.000 | | |
| 5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun | 8 | 8 | 28.080.000 | 8 | 24.500.000 | 8 | 24.500.000 | 8 | 24.500.000 | 8 | 24.500.000 | 8 | 24.500.000 | | |
| 5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 4 | 4 | 9.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | | |
| 5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 4 | 4 | 19.080.000 | 4 | 19.500.000 | 4 | 19.500.000 | 4 | 19.500.000 | 4 | 19.500.000 | 4 | 19.500.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan yang terimplementasikan dalam SIPD | 0 | 0 | - | 0 | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 10.300.000 | | 11.000.000 | | |
| 5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 0 | 0 | - | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | | |
| 5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 4.300.000 | 2 | 5.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan perencanaan daerah | 96.63 | 96,75 | 1.103.852.000 | 96,90 | 600.000.000 | 97,00 | 606.700.000 | 97,10 | 615.800.000 | 97,30 | 628.400.000 | 97,50 | 643.200.000 | |
| 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah | 36 | 68 | 250.902.000 | 34 | 200.000.000 | 34 | 205.000.000 | 34 | 210.000.000 | 34 | 218.000.000 | 51 | 220.200.000 | |
| 5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 18 | 27 | 28.130.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | 30 | 30.000.000 | |
| 5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 17 | 27 | 14.600.000 | 20 | 15.000.000 | 20 | 15.000.000 | 20 | 15.000.000 | 20 | 15.000.000 | 30 | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 19 | 27 | 20.520.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | 30 | 25.000.000 | |
| 5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 36 | 27 | 25.784.300 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 45.000.000 | |
| 5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 20 | 38 | 17.922.000 | 14 | 20.000.000 | 14 | 20.000.000 | 14 | 20.000.000 | 14 | 20.000.000 | 21 | 20.200.000 | |
| 5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | 20 | 30 | 20.380.000 | 14 | 15.000.000 | 14 | 15.000.000 | 14 | 15.000.000 | 14 | 15.000.000 | 21 | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 20 | 30 | 46.020.000 | 14 | 25.000.000 | 14 | 25.000.000 | 14 | 25.000.000 | 14 | 30.000.000 | 21 | 25.000.000 | |
| 5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 40 | 60 | 77.545.700 | 5 | 40.000.000 | 6 | 45.000.000 | 5 | 45.000.000 | 6 | 48.000.000 | 5 | 45.000.000 | |
| 5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah dokumen perencanaan PD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah | 12 | 18 | 519.600.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 201.700.000 | 12 | 203.000.000 | 12 | 208.000.000 | 18 | 213.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 6 | 9 | 10.900.000 | 6 | 25.000.000 | 6 | 25.000.000 | 6 | 25.000.000 | 6 | 25.000.000 | 9 | 25.000.000 | |
| 5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 6 | 9 | 16.700.000 | 6 | - | 6 | 10.000.000 | 6 | 10.000.000 | 6 | 13.000.000 | 9 | 13.000.000 | |
| 5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 6 | 9 | 382.860.000 | 6 | 50.000.000 | 6 | 30.000.000 | 6 | 30.000.000 | 6 | 30.000.000 | 9 | 30.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 12 | 18 | 51.030.000 | 8 | - | 8 | 10.000.000 | 8 | 13.000.000 | 8 | 15.000.000 | 8 | 20.000.000 | |
| 5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 6 | 9 | 10.900.000 | 6 | 35.000.000 | 6 | 35.000.000 | 6 | 35.000.000 | 6 | 35.000.000 | 9 | 35.000.000 | |
| 5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 6 | 9 | 10.600.000 | 6 | - | 6 | 10.000.000 | 6 | 10.000.000 | 6 | 10.000.000 | 9 | 10.000.000 | |
| 5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 6 | 9 | 9.600.000 | 6 | 90.000.000 | 6 | 50.000.000 | 6 | 50.000.000 | 6 | 50.000.000 | 9 | 50.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 12 | 18 | 27.010.000 | 5 | - | 5 | 31.700.000 | 5 | 30.000.000 | 5 | 30.000.000 | 5 | 30.000.000 | |
| 5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah dokumen perencanaan PD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah | 58 | 89 | 333.350.000 | 58 | 200.000.000 | 58 | 200.000.000 | 58 | 202.800.000 | 58 | 202.400.000 | 89 | 210.000.000 | |
| 5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 10 | 15 | 10.300.000 | 10 | 80.000.000 | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | 15 | 30.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 9 | 15 | 11.500.000 | 10 | - | 10 | 15.000.000 | 10 | 15.000.000 | 10 | 15.000.000 | 15 | 15.000.000 | |
| 5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 11 | 15 | 9.150.000 | 10 | 25.000.000 | 10 | 25.000.000 | 10 | 25.000.000 | 10 | 25.000.000 | 15 | 25.000.000 | |
| 5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 20 | 30 | 25.400.000 | 7 | - | 7 | 40.000.000 | 7 | 40.000.000 | 7 | 40.000.000 | 7 | 40.000.000 | |
| 5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 47 | 72 | 91.000.000 | 48 | 70.000.000 | 48 | 30.000.000 | 48 | 30.000.000 | 48 | 30.000.000 | 72 | 30.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 48 | 72 | 9.000.000 | 48 | - | 48 | 15.000.000 | 48 | 15.000.000 | 48 | 15.000.000 | 72 | 15.000.000 |
| 5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 48 | 72 | 9.000.000 | 48 | 25.000.000 | 48 | 25.000.000 | 48 | 25.000.000 | 48 | 25.000.000 | 72 | 25.000.000 |
| 5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 24 | 96 | 168.000.000 | 5 | - | 5 | 20.000.000 | 5 | 22.800.000 | 5 | 22.400.000 | 5 | 30.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | 80.96 | 81,5267 | 7.814.132.457 | 82.10 | 6.664.998.903,33 | 82.67 | 6.739.100.000 | 83.25 | 6.839.600.000 | 83.83 | 6.979.200.000 | 84.42 | 7.142.900.000 | | |
| 5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 16 | 17 | 78.380.000 | 16 | 26.000.000 | 16 | 16.000.000 | 16 | 16.000.000 | 16 | 23.500.000 | 17 | 28.500.000 | | |
| 5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 3 | 53.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 10.000.000 | 3 | 15.000.000 | | |
| 5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 1 | 10.520.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | | |
| 5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 1 | 6.560.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 | 8 | 2.940.000 | 8 | 2.000.000 | 8 | 2.000.000 | 8 | 2.000.000 | 8 | 2.000.000 | 8 | 2.000.000 | |
| 5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | 4 | 5.360.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | |
| 5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | 100 | 4 | 6.201.240.552 | 9 | 5.856.972.115 | 9 | 5.886.231.975 | 9 | 5.887.991.836 | 9 | 5.990.991.836 | 9 | 6.120.991.836 | |
| 5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 476 | 476 orang/bulan | 6.188.240.552 | 44 | 5.851.972.115 | 44 | 5.881.231.975 | 44 | 5.883.491.836 | 44 | 5.983.491.836 | 44 | 6.113.491.836 | |
| 5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 4 | 4 | 2.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 | 5 | 11.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | |
| 5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | N/A | N/A | - | 7 | - | 7 | 2.000.000 | 7 | 2.000.000 | 7 | 2.500.000 | 7 | 2.500.000 | |
| 5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 3.000.000 | 5 | 2.000.000 | 5 | 4.000.000 | 5 | 4.000.000 | |
| 5.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | N/A | N/A | - | 3 | - | 3 | 1.500.000 | 3 | 1.000.000 | 3 | 2.000.000 | 3 | 2.000.000 | |
| 5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | 0 | - | 2 | - | 2 | 1.500.000 | 2 | 1.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | 5 | 6 | 221.640.000 | 6 | 40.000.000 | 6 | 73.841.237 | 6 | 62.000.000 | 6 | 139.000.000 | 6 | 149.000.000 | | |
| 5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6 | 0 | - | 5 | - | 5 | 1.000.000 | 5 | 1.000.000 | 5 | 2.000.000 | 5 | 2.000.000 | | |
| 5.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | N/A | N/A | - | 3 | - | 3 | 1.000.000 | 3 | 1.000.000 | 3 | 2.000.000 | 3 | 2.000.000 | | |
| 5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 | 5 | 35.000.000 | 7 | - | 7 | 30.000.000 | 7 | 20.000.000 | 7 | 35.000.000 | 7 | 35.000.000 | | |
| 5.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 | 60 | 186.640.000 | 60 | 40.000.000 | 60 | 41.841.237 | 60 | 40.000.000 | 60 | 100.000.000 | 60 | 110.000.000 | | |
| 5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase pemenuhan administrasi umum PD | 100 | 100 | 282.888.533 | 100 | 97.500.000,33 | 100 | 105.500.000 | 100 | 95.500.000 | 100 | 201.000.000 | 100 | 209.700.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 | 2 | 3.500.000 | 4 | - | 4 | 1.500.000 | 4 | 500.000 | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | |
| 5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 | 3 | 60.000.000 | 4 | 29.500.000 | 4 | 29.500.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | |
| 5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 | 2 | 12.513.600 | 4 | - | 4 | 1.500.000 | 4 | 500.000 | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | |
| 5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 | 3 | 7.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | |
| 5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 | 4 | 20.500.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 4.000.000 | 4 | 1.500.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | |
| 5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | 12 | 23.468.000 | 12 | - | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75 | 75 | 155.906.933 | 75 | 60.000.000,33 | 75 | 65.000.000 | 75 | 65.000.000 | 75 | 150.000.000 | 75 | 158.700.000 | |
| 5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | 100 | 100 | 116.747.000 | 100 | - | 100 | 30.000.000 | 100 | 270.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 60.000.000 | |
| 5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 260.000.000 | 0 | - | 0 | - | |
| 5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 15.000.000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 10.000.000 | |
| 5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 | 15 | 116.747.000 | 10 | - | 10 | 15.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | |
| 5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | 36 | 36 | 494.836.372 | 24 | 467.026.788 | 24 | 447.026.788 | 24 | 383.608.164 | 24 | 415.708.164 | 24 | 415.708.164 | |
| 5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 15.344.192 | 12 | 15.344.192 | 12 | 15.344.192 | 12 | 15.344.192 | 12 | 15.344.192 | 12 | 15.344.192 | |
| 5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 479.492.180 | 12 | 451.682.596 | 12 | 431.682.596 | 12 | 368.263.972 | 12 | 400.363.972 | 12 | 400.363.972 | |
| 5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 532 | 522 | 418.400.000 | 522 | 177.500.000 | 522 | 177.500.000 | 522 | 122.500.000 | 522 | 155.000.000 | 522 | 155.000.000 | |
| 5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 | 22 | 330.060.000 | 22 | 150.000.000 | 22 | 150.000.000 | 22 | 100.000.000 | 22 | 125.000.000 | 22 | 125.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 | 30 | 38.340.000 | 40 | 7.500.000 | 40 | 7.500.000 | 40 | 7.500.000 | 40 | 10.000.000 | 40 | 10.000.000 | | |
| 5.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | | |
| 5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | |
| 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | 984.000.000 | | 1.087.800.000 | | 1.292.900.000 | | 1.349.900.000 | | 1.358.200.000 | | |
| 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Peningkatan Hasil Inovasi yang Diimplementasikan Secara Berkelanjutan | 47 | | | | 334.000.000 | | 337.800.000 | | 342.900.000 | | 349.900.000 | | 358.200.000 | | |
| 5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Hasil Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun | 0 | 1 | 150.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 0 | 2 | 150.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | | |
| 5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | | |
| 5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | | |
| 5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun | 3 | 1 | 300.000.000 | 2 | - | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 60.000.000 | | |
| 5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan | 1 | 1 | 150.000.000 | 1 | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2 | 1 | 150.000.000 | 1 | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 35.000.000 | |
| | Persentase Peningkatan Hasil Inovasi yang Diimplementasikan Secara Berkelanjutan | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | |
| 5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase usulan Inovasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan | 0 | 12 | 220.200.000 | 14 | | 16 | 212.800.000 | 18 | 217.900.000 | 20 | 224.900.000 | 22 | 223.200.000 | |
| 5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 50 | 50 | 150.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 175.000.000 | 50 | 175.000.000 | 50 | 175.000.000 | 50 | 173.300.000 | |
| 5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penerapan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | |
| 5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 25 | 15 | 70.200.000 | 15 | 4.000.000 | 15 | 12.800.000 | 15 | 17.900.000 | 15 | 24.900.000 | 15 | 24.900.000 | |
| 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Persentase Produk Riset dan Inovasi yang Diimplementasikan | N/A | N/A | - | 42 | 650.000.000 | 44 | 750.000.000 | 46 | 950.000.000 | 48 | 1.000.000.000 | 50 | 1.000.000.000 | |
| 5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | N/A | N/A | - | 5 | 200.000.000 | 6 | 200.000.000 | 6 | 300.000.000 | 6 | 300.000.000 | 7 | 300.000.000 | |
| 5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | N/A | N/A | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | |
| 5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, | N/A | N/A | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , pengkajian, dan penerapan | pengkajian, dan penerapan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | N/A | N/A | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | |
| 5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | N/A | N/A | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | |
| 5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi | Jumlah Invensi dan Inovasi Daerah yang Dihasilkan | N/A | N/A | - | 5 | 450.000.000 | 5 | 550.000.000 | 5 | 650.000.000 | 6 | 700.000.000 | 6 | 700.000.000 | |
| 5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah | N/A | N/A | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) | N/A | N/A | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | | |
| 5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah | Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | N/A | N/A | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | N/A | N/A | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | |
| 5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | N/A | N/A | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | |
| 5.05.03.2.02.0014 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan | N/A | N/A | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | |
| 5.05.03.2.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi | N/A | N/A | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05.03.2.02.0026 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset | N/A | N/A | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | | |

**TABEL 4.3**
**DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA**
**BAPELITBANGDA KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |
| 1 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | |
| | | | *Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Pelaksanaan Konsultasi Publik* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | **Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | | *Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah* | SAE LAYANAN (Mata Prabulinggih) |
| | | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | **Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah** | |
| | | | *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah* | SAE LAYANAN (Mata Prabulinggih) |
| | | | *Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | SAE LAYANAN (Mata Prabulinggih) |
| 2 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | keselarasan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah | **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | |
| | | | *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| | | | *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan* | SAE KERJA (PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI) |
| 3 | Penelitian dan Pengembangan Daerah | Meningkatnya Hasil litbang yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, program atau regulasi daerah | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |
| | | | *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah* | |
| | | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | |
| | | | *Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial* | |
| | | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | |
| | | | *Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan* | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |
| | | | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | |
| | | | *Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi* | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |
| | | | *Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi* | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |
| | | | *Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan* | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |
| | | | *Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual* | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |
| 4 | Riset dan Inovasi Daerah | Meningkatnya Persentase Produk Riset dan Inovasi yang Diimplementasikan | **Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan** | |
| | | | *Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset* | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |
| | | | *Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan* | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |
| | | | *Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan* | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |
| | | | *Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah* | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |
| | | | **Invensi dan Inovasi** | |
| | | | *Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah* | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |
| | | | *Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual* | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah* | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |
| | | | *Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.* | SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) |
| | | | *Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi* | |
| | | | *Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah* | |
| | | | *Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi* | |
| | | | *Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset* | |
| | | | | |

## 4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan telaah terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja Bapelitbangda yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 4.4**
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA**
**BAPELITBANGDA KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| | 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan | Nilai | 23,39 | 23,55 | 23,71 | 23,88 | 24,05 | 24,22 | 24,38 | |
| | Nilai SAKIP Komponen Pengukuran | Nilai | 19,48 | 19,53 | 19,67 | 19,81 | 19,94 | 20,08 | 20,22 | |
| 2 | Prosentase Kenaikan Nilai LHE AKIP | % | 2,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| 3 | Persentase Inovasi yang | % | 0,26 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | berkualitas (Kematangan) | | | | | | | | | |

## TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
## RANCANGAN AKHIR RENSTRA
## BAPELITBANGDA KABUPATEN PROBOLINGGO

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | 5.01 - PERENCANAAN | | | | | | | | | | |
| 1. | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan | positif | Nilai | 23,39 | 23,55 | 23,71 | 23,88 | 24,05 | 24,22 | 24,38 | |
| | Nilai SAKIP Komponen Pengukuran | positif | Nilai | 19,48 | 19,53 | 19,67 | 19,81 | 19,94 | 20,08 | 20,22 | |
| | 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | |
| 2. | Persentase Inovasi yang berkualitas (Kematangan) | positif | % | 0,26 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai tugas dan fungsi Bapelitbangda. Renstra Bapelitbangda Tahun 2025-2029 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bapelitbangda dan menjadi pedoman bagi Bapelitbangda untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025-2029. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Bapelitbangda Tahun 2025-2029, maka Bapelitbangda berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran program dan kegiatan Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2025-2029.

Mengingat upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah dan ringan maka Bapelitbangda sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah tentunya harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara menjadikan rencana strategis ini sebagai pedoman yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Bapelitbangda tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Probolinggo. Di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan tiga tahunan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perangkat daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum perangkat daerah, dan konsultasi publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan program dan kegiatan Renstra Bapelitbangda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, APBD Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Bapelitbangda.

Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian meliputi pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis terhadap deviasi antara rencana dengan realisasi, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah korektif atas permasalahan yang muncul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama:

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbangda. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;

2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;

3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil pengendalian dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, DPRD, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap program dan kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, kaidah pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh tujuan dan sasaran Renstra Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

# RENCANA STRATEGIS
# ( RENSTRA )
# TAHUN 2025 - 2029

## BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JL. Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan - Probolinggo

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026 telah tersusun.

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk menjalankan program dan kegiatannya selama tiga tahun ke depan agar selaras dengan RPD Kabupaten Probolinggo. Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo.

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 yakni tahun 2023. Dengan habisnya masa berlaku RPJMD Kabupaten Probolinggo dan dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024. Maka Bupati Probolinggo yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Darah (Renstra PD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo 2024-2026.

Renstra pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh Perangkat Daerah

dan pegawai Pemerintah Kabupaten Probolinggo tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo selama Tahun 2024-2026. Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Masukan mengenai penyempurnaan Renstra pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026 sangat diharapkan agar kinerja dimasa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.

Probolinggo, Oktober 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PROBOLINGGO

**HERI SUSTYANTO, S.Sos., M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19680525 198903 1 003

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... vi
DAFTAR TABEL ..... vii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 5
1.4 Sistematika Penulisan ..... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ..... 11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah ..... 11
2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah ..... 18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 40
c) Target ..... 42
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ..... 45
2.1.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ..... 48
2.1.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ..... 50
2.1.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ..... 52
2.1.8 Isu – Isu Strategis ..... 54
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 59
3.1 Tujuan ..... 59
3.2 Sasaran ..... 60
3.3 Arah Kebijakan ..... 75
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 78
4.1 Uraian Program ..... 78

4.2 Uraian Kegiatan ..... 79
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif ..... 88
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 99
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ..... 100
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..... 101
BAB V PENUTUP ..... 102
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 103
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 104

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Probolinggo ..... 12
Gambar 3. 1 Lembar Kerja Evaluasi ..... 66
Gambar 3. 2 Nilai Hasil Akhir ..... 67
Gambar 3. 3 Konsep Renstra ..... 69
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra PD80

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 SUSUNAN ORGANISASI ..... 11
*Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai BKPSDM Kab. Probolinggo*..... 18
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai BKPSDM Kab. Probolinggo ..... 18
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai BKPSDM Kab. Probolinggo ..... 19
Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin..... 19
Tabel 2. 6 Jumlah Barang Yang Tidak Ditemukan ..... 21
Tabel 2. 7 Jumlah Barang Dengan Kondisi Yang Rusak Berat ..... 28
Tabel 2. 8 Jumlah Barang Dengan Kondisi Yang Baik ..... 29
Tabel 2. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Periode Tahun 2020-2024 ..... 41
Tabel 2. 10 Anggaran Dan Realisasi Selama Periode Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut ini :..... 44
Tabel 2. 11 Pemetaan Permasalahan Pelayanan..... 52
Tabel 2. 12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD ..... 56
Tabel 3. 1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN..... 70
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD..... 73
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD ..... 77
Tabel 4. 1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN ... 80
Tabel 4. 2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN ..... 89
Tabel 4. 3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS..... 99
Tabel 4. 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA ..... 100
Tabel 4. 5 INDIKATOR KINERJA KUNCI..... 101

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025-2029 dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris) dan Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi) yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, menuangkan visi, misi, dan komitmen politik dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2025 hingga 2029.

Dalam Penyusunan Renstra tahun 2025-2029, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang secara teknis dijabarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini mengamanatkan sejumlah perubahan-perubahan teknis yaitu: Penyusunan Renstra 2025–2029 wajib selaras dengan RPJMD 2025-2045, dan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi lokal, serta kearifan lokal. Langkah ini bertujuan agar setiap daerah dapat merancang kebijakan pembangunan yang inklusif, kontekstual, serta berkelanjutan, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional.

Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan seperti perbedaan , struktur bab dalam dokumen perencanaan daerah (Dokrenda) dan adanya proyeksi hingga tahun 2030 untuk mengakomodasi masa transisi kepala daerah dan persiapan penyusunan RKPD tahun 2030, mengisyaratkan bahwa kesiapan substansi, pemahaman konteks, dan sinergi antar pihak sangat dibutuhkan agar dokumen perencanaan tidak sebatas taat pedoman dan aturan, namun harus relevan terhadap kondisi dan perkembangan, partisipatif dan berdaya guna. Dalam pelaksanaan penyusunan rencana jangka menengah proses dimulai pada tahap persiapan termasuk membentuk tim penyusun, menerapkan desain tim penyusun, mempersiapkan agenda kerja tim, menganalisis penilaian, dan hal -hal lain yang diperlukan dalam prosedur yang telah ditentukan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 (ayat 29), Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun atau ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hadir sebagai pembaruan dari UU No. 5 Tahun 2014 yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Perubahan regulasi ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Dimana menegaskan kesetaraan kedudukan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari ASN, dengan hak dan kewajiban yang setara dalam hal penghasilan, pengembangan kompetensi, penghargaan, jaminan sosial, hingga bantuan hukum. Selain itu, menjadi dasar hukum bagi penataan tenaga non-ASN/honorer agar manajemen kepegawaian lebih tertib dan berbasis sistem merit.

Lahirnya Undang - Undang No. 20 Tahun 2023 juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat penerapan sistem merit, mendorong digitalisasi manajemen ASN, meningkatkan kesejahteraan pegawai, serta memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi. Dengan demikian, keberadaan regulasi ini menjadi landasan penting bagi instansi pemerintah, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk menyusun perencanaan strategis dalam rangka mewujudkan ASN yang berdaya saing, inovatif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, pada tingkat Perangkat Daerah, Renstra Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) seluruh perangkat daerah di lingkungan

Kabupaten Probolinggo setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Nega-

ra Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo dimaksudkan agar Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo mempunyai dokumen perencanaan strategis yang diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo.

Adapun tujuan penyusunan perencanaan strategis adalah untuk:

1) Menjabarkan Visi dan Misi Bupati Probolinggo melalui Rencana Strate-

gi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo;

2) Menjabarkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 ke dalam program kerja operasional;
3) Menetapkan prioritas program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya dan indikator kinerja yang strategi selama 5 (lima) Tahun, yang dimana menjadi rujukan setiap tahun dalam penyusunan rencaja kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
4) Mengevaluasi kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) Tahun dan Menjadikan tolak ukur penilaian keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung-jawab BKPSDM dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang;

   Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.
2. Dasar hukum penyusunan;

   Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Maksud dan tujuan;

   Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
4. Sistematika Penulisan;

   Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-

2029.

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
   a. Tugas, fungsi dan struktur PD;
   b. Sumber daya PD;
   c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
   d. Kelompok sasaran pelayanan PD;
   e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
   f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada); dan
   g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (iikalau ada).
5. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

6. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
7. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun basil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.
8. Merumuskan isu strategis daerah {dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
   a. permasalahan;
   b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
   c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
   a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
   b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat mt, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
3. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:
   a. kalimat kondisi;

b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. disusun dengan bahasayangjelas dan mudah dipahami; dan
d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

5. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ sub-kegiatan dala menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
6. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.
7. Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
8. Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan / atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
9. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat :

1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta Pemutakhirannya.

3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.
4. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
5. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
6. IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

**BAB V. PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

### *2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah*

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 SUSUNAN ORGANISASI**

| **Kepala Badan** | |
|---|---|
| Sekretaris | • Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian<br>• Kepala Sub Bagian Keuangan<br>• Kelompok Jabatan Fungsional |
| Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Informasi | • Kelompok Jabatan Fungsional |
| Kepala Bidang Mutasi dan Promosi | • Kelompok Jabatan Fungsional |
| Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur | • Kelompok Jabatan Fungsional |
| Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Aparatur | • Kelompok Jabatan Fungsional |

Unsur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo terdiri dari:

a. Unsur pimpinan, adalah kepala.
b. Unsur pembantu pimpinan, adalah sekretariat dan sub bagian; dan
c. Unsur pelaksana adalah bidang, dan kelompok jabatan fungsional.

Adapun susunan organisasinya adalah sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi:

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data Dan Informasi membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Mutasi dan Promosi membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Aparatur membawahi:
   a. Kelompok jabatan fungsional

Berikut Gambar Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo:

**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Probolinggo**

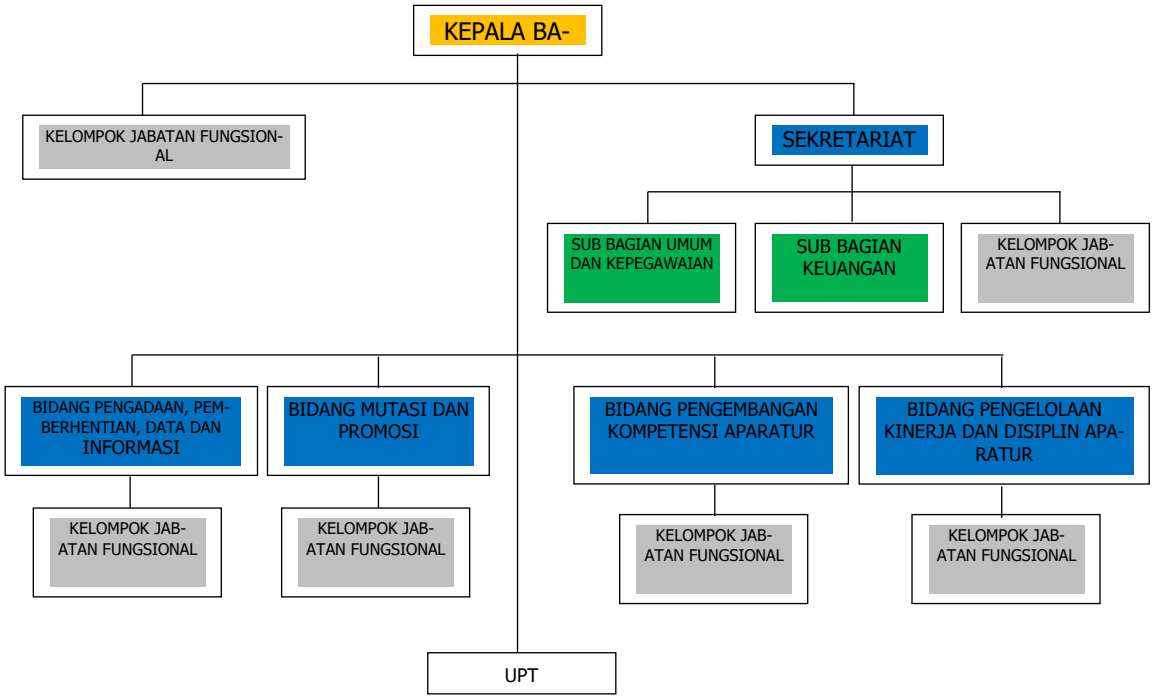


Sumber Perbup 14 Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022

Ketugasan dan fungsi masing-masing bidang dijabarkan sebagai berikut:

**1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem pengendalian Intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;

e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah/negara, kearsipan dan dokumentasi;
f. penyusunan, pelaksanaan, perorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu:

**3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
c. penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
d. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
e. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
f. penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**4. Kepala Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;

a. pengelolaan administrasi keuangan;
b. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
c. penyiapan bahan verifikasi dan pembukaan;
d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran / data dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. penyusunan administrasi rencana program /kegiatan /anggaran /data dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran data serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**6. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Informasi**

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Informasi melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengadaan dan pemberhentian ASN serta pengelolaan data dan informasi manajemen kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Informasi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan pengadaan dan pemberhentian ASN serta pengelolaan data dan informasi manajemen kepegawaian;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan ASN;
c. pengoordinasian penetapan Nomor Induk Pegawai dan Pengangkatan Calon Pegawai ASN;
d. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian ASN;
e. pengoordinasian pengolahan data, pengembangan dan pembangunan sistem informasi manajemen ASN;

f. pendokumentasian peraturan perundang-undangan kepegawaian;
g. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemberhentian ASN serta pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**7. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi**

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis mutasi, kepangkatan, pengembangan karier dan promosi ASN. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi:

a. Pengadministrasian dan pemrosesan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
b. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan mutasi;
c. pengoordinasian penyusunan rencana suksesi, pola karier dan pengembangan karier;
d. pelaksanaan analisa dan verifikasi usulan promosi;
e. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan seleksi jabatan;
f. perencanaan dan pelaksanaan tes kesehatan bagi Calon PNS;
g. perencanaan dan pelaksanaan pengangkatan dan pengambilan sumpah PNS;
h. penyiapan bahan usulan Kartu Pegawai (Karpeg);
i. pengelolaan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan peninjauan masa kerja;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan mutasi, kepangkatan, kengembangan karier dan promosi ASN;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**8. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur**

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan ASN. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala

Bidang Pengembangan dan Kompetensi Aparatur mempunyai fungsi:

a. penganalisaan dan penyusunan rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur;
b. penjaringan, seleksi, dan pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan;
c. pengoordinasian perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
d. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
e. pengoordinasian perencanaan dan penyelenggaraan assassement dan uji kompetensi;
f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**9. Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Aparatur**

Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Aparatur mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Penilaian dan Evaluasi Kinerja serta Disiplin dan Penghargaan ASN. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kinerja dan disiplin aparatur;
b. pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja dan penegakan disiplin aparatur;
c. penilaian kinerja dan disiplin aparatur;
d. pelaksanaan tindak lanjut kinerja dan disiplin aparatur;
e. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kinerja aparatur;
f. pengelolaan cuti aparatur;
g. pengelolaan usulan Kartu Istri/Suami aparatur;
h. pengelolaan penetapan status dan kedudukan hukum aparatur;
i. pengelolaan izin perkawinan dan perceraian aparatur;
j. pengelolaan administrasi peningkatan kesejahteraan dan penghargaan aparatur;
k. pelaksanaan fasilitasi pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### *2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, dan sarana prasarana yang memadai. Dukungan SDM aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo sebanyak 59 orang (Sumber: SIAP BKPSDM Kabupaten Probolinggo, per 31 Desember 2024), dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jenjang pendidikan, eselon dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**a. Berdasarkan Golongan**

***Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai BKPSDM Kab. Probolinggo***

**Berdasarkan Golongan**

| NO | BIDANG | GOLONGAN | | | | | | TOTAL (ORANG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | | | | PPPK | | |
| | | I | II | III | IV | VII | IX | |
| 1 | SEKRETARIAT | - | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DATA DAN INFORMASI | - | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | MUTASI DAN PROMOSI | - | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | PENGELOLAAN KINERJA DAN DISIPLIN APARATUR | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | PENGEMBANGAN DAN KOMPETENSI APARATUR | - | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| | **JUMLAH (ORANG)** | **-** | **12** | **27** | **6** | **2** | **5** | **52** |
| | **PERSENTASE (%)** | **-** | **23.08%** | **51.92%** | **11.54%** | **3.85%** | **9.62%** | |

*Sumber: SIAP BKPSDM Kab Probolinggo, per 31 Desember 2024*

**b. Berdasarkan Pendidikan**

**Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai BKPSDM Kab. Probolinggo**
**Berdasarkan Pendidikan**

| NO | BIDANG | PENDIDIKAN | | | | | | | TOTAL (ORANG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SLTP | SLTA | DI | DIII | DIV | S1 | S2 | |
| 1 | SEKRETARIAT | 0 | 1 | - | 2 | - | 9 | 3 | **15** |
| 2 | PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DATA DAN INFORMASI | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | **10** |
| 3 | MUTASI DAN PROMOSI | 0 | 0 | - | - | - | 8 | 4 | **12** |
| 4 | PENGELOLAAN KINERJA DAN | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 4 | **6** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DISIPLIN APARA-TUR | | | | | | | | |
| 5 | PENGEMBANGAN DAN KOMPETENSI APARATUR | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | **9** |
| 6 | NON ASN | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | **7** |
| | **JUMLAH (ORANG)** | **1** | **5** | **2** | **6** | **0** | **27** | **18** | **59** |
| | **PERSENTASE (%)** | **5.56%** | **8.47%** | **3.39%** | **10.17%** | **0.00%** | **45.76%** | **30.51%** | |

*Sumber: SIAP BKPSDM Kab Probolinggo, per 31 Desember* 2024

- Kualifikasi Pendidikan Tinggi Pegawai

  Sebagian besar pegawai berpendidikan S1 (45,76%) dan S2 (30,51%), totalnya mencapai 76,27% dari seluruh pegawai.
- Pendidikan Menengah ke Bawah

  Pegawai dengan latar pendidikan SLTP, SLTA, DI, dan DIII jumlahnya relatif kecil (kurang dari 30% total).
- Tidak Ada DIV

  Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan Diploma IV.

  Implikasi

  Tingginya proporsi pegawai S1 dan S2 menunjukkan kapasitas SDM cukup baik, tetapi perlu peningkatan kompetensi lanjutan bagi yang berpendidikan menengah.

**c. Berdasarkan Eselon**

**Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai BKPSDM Kab. Probolinggo**

**Berdasarkan Eselon**

| Eselon | Laki – Laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Eselon II.b | 1 | - |
| Eselon III.a | 1 | - |
| Eselon III.b | 4 | - |
| Eselon IV.a | 1 | 1 |
| Kelompok Jabatan Fungsional | 12 | 12 |

*Sumber: SIAP BKPSDM Kab Probolinggo, per 31 Desember 2024*

**d. Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

| NO | BIDANG | JENIS KELAMIN | | TOTAL (ORANG) |
|---|---|---|---|---|
| | | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | SEKRETARIAT | 9 | 6 | 15 |
| 2 | PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DATA DAN INFORMASI | 4 | 6 | 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | MUTASI DAN PROMOSI | 9 | 3 | 12 |
| 4 | PENGELOLAAN KINERJA DAN DISIPLIN APARATUR | 4 | 2 | 6 |
| 5 | PENGEMBANGAN DAN KOMPETENSI APARATUR | 5 | 4 | 9 |
| 6 | NON ASN | 6 | 1 | 7 |
| | **JUMLAH (ORANG)** | **37** | **22** | 59 |
| | **PERSENTASE (%)** | **62.71%** | **37.29%** | |

*Sumber: SIAP BKPSDM Kab Probolinggo, per 31 Desember 2024*

Penjelasan Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi keseluruhan dari total 59 pegawai BKPSDM, terdapat 37 laki-laki (62,71%) dan 22 perempuan (37,29%).

1. Bidang Sekretariat Memiliki jumlah pegawai terbanyak (15 orang) dengan distribusi relatif seimbang (9 laki-laki, 6 perempuan).
2. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data Dan Informasi justru lebih banyak perempuan (6) dibanding laki-laki (4).
3. Bidang Mutasi & Promosi didominasi laki-laki (9 laki-laki, 3 perempuan).
4. Bidang Pengelolaan Kinerja Dan Disiplin Aparatur (4 laki-laki, 2 perempuan).
5. Bidang Pengembangan Dan Kompetensi Aparatur hampir seimbang (5 laki-laki, 4 perempuan).
6. Non ASN didominasi laki-laki (6) dibanding perempuan (1).

**Sumber Daya Aset**

Sementara itu, untuk sumber daya aset dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. 6 Jumlah Barang Yang Tidak Ditemukan

| NO | TAHUN | NAMA BARANG | MERK | KONDISI | PEROLEHAN | HARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2008 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) | brother | tidak ditemukan | Pembelian | 1,500,000 |
| 2. | 2005 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | CASIO | tidak ditemukan | Pembelian | 400,000 |
| 3. | 2005 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | CASIO | tidak ditemukan | Pembelian | 685,000 |
| 4. | 2006 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | CASIO / DM-1600 16 Digit | tidak ditemukan | Pembelian | 500,000 |
| 5. | 2006 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | citizen / - | tidak ditemukan | Pembelian | 500,000 |
| 6. | 2006 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | citizen / ct 9500 | tidak ditemukan | Pembelian | 500,000 |
| 7. | 2007 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | - | tidak ditemukan | Pembelian | 200,000 |
| 8. | 2009 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | CASIO | tidak ditemukan | Pembelian | 550,000 |
| 9. | 2010 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | casio | tidak ditemukan | Pembelian | 569,000 |
| 10. | 2010 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | - | tidak ditemukan | Pembelian | 150,000 |
| 11. | 2011 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | CASIO / - | tidak ditemukan | Pembelian | 300,000 |
| 12. | 2012 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | Casio | tidak ditemukan | Pembelian | 1,715,000 |
| 13. | 2008 | Lemari Besi/Metal | BROTHER / - | tidak ditemukan | Pembelian | 9,680,000 |
| 14. | 2008 | Lemari Besi/Metal | BROTHER | tidak ditemukan | Pembelian | 43,560,000 |
| 15. | 2008 | Lemari Besi/Metal | BROTHER / - | tidak ditemukan | Pembelian | 2,660,000 |
| 16. | 2010 | Lemari Besi/Metal | briliant | tidak ditemukan | Pembelian | 12,265,000 |
| 17. | 2011 | Lemari Besi/Metal | BROTHER | tidak ditemukan | Pembelian | 5,450,000 |
| 18. | 2011 | Lemari Besi/Metal | BROTHER | tidak ditemukan | Hibah | 3,475,000 |
| 19. | 2007 | Rak Kayu | - | tidak ditemukan | Pembelian | 1,500,000 |
| 20. | 2004 | Filing Cabinet Besi | DAITO | tidak ditemukan | Pembelian | 1,430,000 |
| 21. | 2003 | Lemari Kaca | BROTHER | tidak ditemukan | Pembelian | 693,750 |
| 22. | 2003 | Lemari Kaca | BROTHER | tidak ditemukan | Pembelian | 971,250 |
| 23. | 2008 | White Board | - / - | tidak ditemukan | Pembelian | 550,000 |
| 24. | 2009 | Alat Penghancur Kertas | ATC | tidak ditemukan | Pembelian | 14,000,000 |
| 25. | 2003 | Alat Kantor Lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 6,567,500 |
| 26. | 2004 | Alat Kantor Lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 5,000,000 |
| 27. | 2005 | Alat Kantor Lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 20,000 |
| 28. | 2005 | Alat Kantor Lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 25,805,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 2005 | Alat Kantor Lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 1,000,000 |
| 30. | 2006 | Alat Kantor Lainnya | SANDIS / - | tidak ditemukan | Pembelian | 500,000 |
| 31. | 2007 | Alat Kantor Lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 300,000 |
| 32. | 2007 | Alat Kantor Lainnya ( FLAsdisk ) | SANDIS | tidak ditemukan | Pembelian | 3,225,000 |
| 33. | 2008 | Alat Kantor Lainnya ( Flasdisk ) | KINGSTON | tidak ditemukan | Pembelian | 3,350,000 |
| 34. | 2009 | Alat Kantor Lainnya ( Flasdisk ) | KINGSTON | tidak ditemukan | Pembelian | 2,550,000 |
| 35. | 2010 | Alat Kantor Lainnya ( Flasdisk ) | kingston | tidak ditemukan | Pembelian | 1,395,250 |
| 36. | 2011 | Alat Kantor Lainnya ( Flasdisk ) | SANDISK | tidak ditemukan | Pembelian | 520,000 |
| 37. | 2011 | Alat Kantor Lainnya ( Flasdisk ) | SANDISK / - | tidak ditemukan | Pembelian | 520,000 |
| 38. | 2011 | Alat Kantor Lainnya ( Flasdisk ) | SANDISK / - | tidak ditemukan | Pembelian | 800,000 |
| 39. | 2005 | Kursi Putar | Jaguar | tidak ditemukan | Pembelian | 885,000 |
| 40. | 2006 | Kursi Lipat | CHITOSE | tidak ditemukan | Hibah | 2,250,000 |
| 41. | 2006 | Meubeleur lainnya | DAINICI | tidak ditemukan | Hibah | 900,000 |
| 42. | 2006 | Meubeleur lainnya | phonik | tidak ditemukan | Hibah | 4,200,000 |
| 43. | 2010 | Meubeleur lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 9,900,000 |
| 44. | 2010 | Meubeleur lainnya | - | tidak ditemukan | Hibah | 4,537,000 |
| 45. | 2010 | Meubeleur lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 95,000 |
| 46. | 2012 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | Denpo / vc 0012 | tidak ditemukan | Pembelian | 1,500,000 |
| 47. | 2006 | A.C. Window | Panasonic | tidak ditemukan | Hibah | 31,200,000 |
| 48. | 2009 | A.C. Window | PANASONIC | tidak ditemukan | Hibah | 16,800,000 |
| 49. | 2009 | A.C. Window | PANSONIC / 1 PK | tidak ditemukan | Hibah | 4,500,000 |
| 50. | 2010 | A.C. Window | Panasonic | tidak ditemukan | Hibah | 15,800,000 |
| 51. | 2010 | A.C. Window | LG / 500 LS-1 | tidak ditemukan | Pembelian | 3,650,000 |
| 52. | 2003 | Kipas Angin | PANASONIK | tidak ditemukan | Pembelian | 148,000 |
| 53. | 2010 | Kipas Angin | NATIONAL | tidak ditemukan | Hibah | 6,120,000 |
| 54. | 2008 | Tabung Gas | elpiji | tidak ditemukan | Pembelian | 1,400,000 |
| 55. | 2003 | Alat Dapur lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 127,190 |
| 56. | 2003 | Alat Dapur lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 388,512 |
| 57. | 2003 | Alat Dapur lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 1,050 |
| 58. | 2003 | Alat Dapur lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 391,305 |
| 59. | 2006 | Alat Dapur lainnya | duralex / - | tidak ditemukan | Pembelian | 1,000,000 |
| 60. | 2007 | Alat Dapur lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 380,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 2009 | Alat Dapur lainnya | Duralex | tidak ditemukan | Pembelian | 2,981,000 |
| 62. | 2010 | Alat Dapur lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 2,980,000 |
| 63. | 2010 | Alat Dapur lainnya | Sango | tidak ditemukan | Pembelian | 2,947,000 |
| 64. | 2011 | Alat Dapur lainnya | - / - | tidak ditemukan | Pembelian | 1,017,750 |
| 65. | 2011 | Alat Dapur lainnya | - / - | tidak ditemukan | Pembelian | 225,000 |
| 66. | 2012 | Alat Dapur lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 425,000 |
| 67. | 2008 | Televisi | sanken | tidak ditemukan | Pembelian | 1,200,000 |
| 68. | 2011 | Televisi | PANASONIC / V ERA | tidak ditemukan | Hibah | 7,875,000 |
| 69. | 2010 | Megaphone | TOA | tidak ditemukan | Pembelian | 600,000 |
| 70. | 2003 | Microphone | weston | tidak ditemukan | Pembelian | 878,750 |
| 71. | 2013 | Stabilisator | VYBA | tidak ditemukan | Pembelian | 680,000 |
| 72. | 2008 | Camera Video | CCD DM750 / DM 750 | tidak ditemukan | Hibah | 1,800,000 |
| 73. | 2012 | Camera Video | Canon / EOS 1100 D EF-S | tidak ditemukan | Pembelian | 7,900,000 |
| 74. | 2003 | Dispenser | Luwi | tidak ditemukan | Pembelian | 971,250 |
| 75. | 2006 | Handy Cam | SONY | tidak ditemukan | Pembelian | 2,600,000 |
| 76. | 2007 | Vertikal Blind | - | tidak ditemukan | Pembelian | 1,000,000 |
| 77. | 2003 | Gordyin/Kray | BLINDS | tidak ditemukan | Pembelian | 971,250 |
| 78. | 2012 | Gordyin/Kray | onda | tidak ditemukan | Pembelian | 4,500,000 |
| 79. | 2003 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | Aqua | tidak ditemukan | Pembelian | 32,375 |
| 80. | 2008 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | - | tidak ditemukan | Hibah | 4,530,000 |
| 81. | 2009 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | - / - | tidak ditemukan | Hibah | 2,025,000 |
| 82. | 2011 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | - / - | tidak ditemukan | Pembelian | 5,924,000 |
| 83. | 2011 | Alat Rumah Tangga Lain-lain ( Toples ) | - / - | tidak ditemukan | Pembelian | 2,175,000 |
| 84. | 2005 | Kursi Kerja Pejabat lainnya | BROTHER | tidak ditemukan | Hibah | 4,050,000 |
| 85. | 2011 | Microphone/Boom Stand | SE ELECTRONICS / - | tidak ditemukan | Pembelian | 5,875,000 |
| 86. | 2007 | peralatan studio audio lainnya (dst) | ROLAND / EXR 5s | tidak ditemukan | Pembelian | 14,000,000 |
| 87. | 2007 | peralatan studio audio lainnya (dst) | BEN-Q / - | tidak ditemukan | Pembelian | 18,000,000 |
| 88. | 2010 | peralatan studio audio lainnya (dst) | - / - | tidak ditemukan | Pembelian | 3,810,700 |
| 89. | 2011 | peralatan studio audio lainnya (dst) | TOA / - | tidak ditemukan | Pembelian | 12,300,000 |
| 90. | 2006 | Camera Electronic | GENIUS / G SHOT DV 610 | tidak ditemukan | Pembelian | 2,150,000 |
| 91. | 2007 | Camera Electronic | SONY / - | tidak ditemukan | Pembelian | 7,500,000 |
| 92. | 2012 | Camera Electronic | Fujifilm S 3200 / S 3200 | tidak ditemukan | Pembelian | 7,225,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93. | 2007 | Camera Film | CASIO EXILIM / EX-270 | tidak ditemukan | Pembelian | 3,617,500 |
| 94. | 2007 | Camera Film | Gshot / - | tidak ditemukan | Pembelian | 5,500,000 |
| 95. | 2008 | Lensa Kamera | SONY | tidak ditemukan | Pembelian | 990,000 |
| 96. | 2009 | Layar Film/Projector | Panasonic | tidak ditemukan | Pembelian | 19,855,000 |
| 97. | 2004 | Pesawat Telephone | HUAWEI | tidak ditemukan | Hibah | 1,750,000 |
| 98. | 2009 | Pesawat Telephone | - | tidak ditemukan | Pembelian | 1,440,000 |
| 99. | 2013 | Pesawat Telephone | - | tidak ditemukan | Pembelian | 3,150,000 |
| 100. | 2003 | alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst) | VALENCIA GLASS | tidak ditemukan | Pembelian | 1,156,300 |
| 101. | 2003 | P.C Unit | pentium IV / P-4-2/0 | tidak ditemukan | Pembelian | 12,950,000 |
| 102. | 2003 | P.C Unit | Pentium | tidak ditemukan | Pembelian | 8,325,000 |
| 103. | 2003 | P.C Unit | PENTIUM IV | tidak ditemukan | Pembelian | 3,700,000 |
| 104. | 2004 | P.C Unit | ASUS | tidak ditemukan | Hibah | 50,000,000 |
| 105. | 2004 | P.C Unit | ASUS | tidak ditemukan | Pembelian | 8,500,000 |
| 106. | 2005 | P.C Unit | DEsknote | tidak ditemukan | Pembelian | 38,785,000 |
| 107. | 2006 | P.C Unit | P4 | tidak ditemukan | Hibah | 7,400,000 |
| 108. | 2006 | P.C Unit | Pentium IV | tidak ditemukan | Pembelian | 4,950,000 |
| 109. | 2007 | P.C Unit | ASUS | tidak ditemukan | Pembelian | 26,050,000 |
| 110. | 2007 | P.C Unit | ASUS / - | tidak ditemukan | Hibah | 21,900,000 |
| 111. | 2008 | P.C Unit | LG / pentium IV | tidak ditemukan | Hibah | 13,931,000 |
| 112. | 2010 | P.C Unit | DELL | tidak ditemukan | Pembelian | 14,800,000 |
| 113. | 2010 | P.C Unit | dell / T 310 | tidak ditemukan | Pembelian | 22,600,000 |
| 114. | 2010 | P.C Unit | HP / PAVILION Ms 216 | tidak ditemukan | Pembelian | 10,750,000 |
| 115. | 2010 | P.C Unit | DELL / INTERCORE DUO | tidak ditemukan | Hibah | 9,800,000 |
| 116. | 2011 | P.C Unit | PENTIUM / - | tidak ditemukan | Pembelian | 7,450,000 |
| 117. | 2011 | P.C Unit | PENTIUM / 4 CORE 1-3 550 | tidak ditemukan | Hibah | 9,885,000 |
| 118. | 2012 | P.C Unit | AOC / - | tidak ditemukan | Pembelian | 8,975,000 |
| 119. | 2012 | P.C Unit | LG / - | tidak ditemukan | Pembelian | 4,850,000 |
| 120. | 2013 | P.C Unit | ACER | tidak ditemukan | Pembelian | 5,900,000 |
| 121. | 2013 | P.C Unit | DELL | tidak ditemukan | Pembelian | 25,000,000 |
| 122. | 2013 | P.C Unit | ASUS | tidak ditemukan | Pembelian | 10,445,000 |
| 123. | 2005 | Lap Top | Toshiba / nx 9040 | tidak ditemukan | Pembelian | 18,200,000 |
| 124. | 2006 | Lap Top | Toshiba / A 100 1,7 GHZ | tidak ditemukan | Pembelian | 15,750,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125. | 2007 | Lap Top | TOSHIBA SATELIT / A 105 | tidak ditemukan | Pembelian | 13,400,000 |
| 126. | 2007 | Lap Top | ASUS | tidak ditemukan | Pembelian | 12,000,000 |
| 127. | 2007 | Lap Top | TOSHIBA / U 50 INTELCORE 20 T 2130 | tidak ditemukan | Pembelian | 18,000,000 |
| 128. | 2008 | Lap Top | toshiba Satelit / A 205 | tidak ditemukan | Pembelian | 34,500,000 |
| 129. | 2009 | Lap Top | SONY VAIO / VGN TT 35GN | tidak ditemukan | Pembelian | 24,640,000 |
| 130. | 2009 | Lap Top | Toshiba / L 310-t6400 VHB | tidak ditemukan | Pembelian | 11,428,960 |
| 131. | 2009 | Lap Top | Toshiba Portege M 800 | tidak ditemukan | Pembelian | 18,500,000 |
| 132. | 2009 | Lap Top | Toshiba / A-205 | tidak ditemukan | Pembelian | 12,895,000 |
| 133. | 2010 | Lap Top | toshiba / intel dual core | tidak ditemukan | Pembelian | 11,045,500 |
| 134. | 2011 | Lap Top | toshiba / - | tidak ditemukan | Pembelian | 14,500,000 |
| 135. | 2011 | Lap Top | dell | tidak ditemukan | Pembelian | 13,100,000 |
| 136. | 2011 | Lap Top | SONY VAIO | tidak ditemukan | Pembelian | 18,900,000 |
| 137. | 2011 | Lap Top | Toshiba Satelite / L 640 | tidak ditemukan | Pembelian | 13,832,500 |
| 138. | 2011 | Lap Top | TOSHIBA / L 640 | tidak ditemukan | Pembelian | 14,150,000 |
| 139. | 2003 | Note Book | TOSHIBA | tidak ditemukan | Pembelian | 12,025,000 |
| 140. | 2007 | Note Book | acer | tidak ditemukan | Pembelian | 19,500,000 |
| 141. | 2011 | Note Book | ACER / ASPIRE 4750G | tidak ditemukan | Hibah | 14,150,000 |
| 142. | 2003 | Personal Komputer lainnya | THOSIBA | tidak ditemukan | Pembelian | 878,750 |
| 143. | 2008 | Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe) | TOSHIBA | tidak ditemukan | Pembelian | 3,750,000 |
| 144. | 2007 | CPU (Peralatan Mainframe) | TOSHIBA / pentium IV | tidak ditemukan | Pembelian | 4,500,000 |
| 145. | 2008 | CPU (Peralatan Mainframe) | INTEL | tidak ditemukan | Pembelian | 4,500,000 |
| 146. | 2007 | Hard Disk | TOSHIBA | tidak ditemukan | Pembelian | 3,268,000 |
| 147. | 2008 | Hard Disk | TOSHIBA | tidak ditemukan | Pembelian | 5,390,000 |
| 148. | 2010 | Hard Disk | WD EXTENSIAL TERA | tidak ditemukan | Pembelian | 3,548,250 |
| 149. | 2005 | peralatan mainframe lainnya (dst) | - | tidak ditemukan | Pembelian | 1,250,000 |
| 150. | 2007 | Keyboard (Peralatan Mini Komputer) | LOGITEC | tidak ditemukan | Pembelian | 50,000 |
| 151. | 2007 | CPU (Peralatan Personal Komputer) | INTEL / PIV 3 06 H2 LG A | tidak ditemukan | Pembelian | 7,880,000 |
| 152. | 2006 | Monitor | SONY | tidak ditemukan | Pembelian | 2,500,000 |
| 153. | 2004 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON / LBP 1210 | tidak ditemukan | Pembelian | 4,300,000 |
| 154. | 2005 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON | tidak ditemukan | Pembelian | 5,300,000 |
| 155. | 2005 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON | tidak ditemukan | Pembelian | 600,000 |
| 156. | 2006 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Epson / Stylus C 45 | tidak ditemukan | Hibah | 800,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157. | 2007 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | canon | tidak ditemukan | Pembelian | 7,717,000 |
| 158. | 2007 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON / - | tidak ditemukan | Hibah | 2,400,000 |
| 159. | 2007 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON | tidak ditemukan | Pembelian | 600,000 |
| 160. | 2007 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / LQ 2080 | tidak ditemukan | Pembelian | 5,479,925 |
| 161. | 2007 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / LQ 2180 | tidak ditemukan | Pembelian | 7,500,000 |
| 162. | 2007 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / LQ 2090 | tidak ditemukan | Hibah | 7,585,000 |
| 163. | 2007 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / LQ 2090 | tidak ditemukan | Hibah | 7,585,000 |
| 164. | 2008 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Canon / PIXMA Ip 2880 | tidak ditemukan | Hibah | 1,580,000 |
| 165. | 2008 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | canon | tidak ditemukan | Pembelian | 5,896,000 |
| 166. | 2008 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | canon modif | tidak ditemukan | Pembelian | 4,500,000 |
| 167. | 2008 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON MULTI FUNGSI / MX 318 | tidak ditemukan | Pembelian | 4,700,000 |
| 168. | 2008 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON / PIXMA MP 145 | tidak ditemukan | Pembelian | 1,500,000 |
| 169. | 2008 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON | tidak ditemukan | Hibah | 6,500,000 |
| 170. | 2009 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON / PIXMA MX 328 | tidak ditemukan | Pembelian | 5,400,000 |
| 171. | 2009 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON / PIXMA 1989 MODIF | tidak ditemukan | Pembelian | 3,886,425 |
| 172. | 2009 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | canon / 1980 | tidak ditemukan | Pembelian | 1,100,000 |
| 173. | 2009 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | canon | tidak ditemukan | Pembelian | 2,700,000 |
| 174. | 2010 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Canon / PIXMA Modif ip 2770 | tidak ditemukan | Pembelian | 10,150,000 |
| 175. | 2010 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Canon / modif 1980 | tidak ditemukan | Pembelian | 800,000 |
| 176. | 2011 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON MODIF | tidak ditemukan | Pembelian | 4,000,000 |
| 177. | 2011 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CAnon MOdif MP 258 / - | tidak ditemukan | Pembelian | 4,040,000 |
| 178. | 2011 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / TX 110 mULTI fUNGSI | tidak ditemukan | Pembelian | 1,500,000 |
| 179. | 2011 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CAnon | tidak ditemukan | Pembelian | 557,250 |
| 180. | 2011 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON / BP 3250 | tidak ditemukan | Pembelian | 4,665,000 |
| 181. | 2011 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON / MP 258 | tidak ditemukan | Pembelian | 1,750,000 |
| 182. | 2012 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Canon / - | tidak ditemukan | Pembelian | 1,475,000 |
| 183. | 2012 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Canon MP 258 | tidak ditemukan | Pembelian | 1,500,000 |
| 184. | 2012 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | HP Laser jet / 1132 MFP | tidak ditemukan | Pembelian | 5,100,000 |
| 185. | 2013 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON / MX377 snQC2979 | tidak ditemukan | Pembelian | 6,500,000 |
| 186. | 2013 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON | tidak ditemukan | Pembelian | 1,575,000 |
| 187. | 2013 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | canon / pixma | tidak ditemukan | Pembelian | 3,590,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188. | 2013 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | canon pixma | tidak ditemukan | Pembelian | 6,500,000 |
| 189. | 2013 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | HP / laser jet CP1025 | tidak ditemukan | Pembelian | 4,610,000 |
| 190. | 2013 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / L 210 | tidak ditemukan | Pembelian | 4,500,000 |
| 191. | 2011 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | CANON / - | tidak ditemukan | Pembelian | 1,000,000 |
| 192. | 2005 | Keyboard (Peralatan Personal Komputer) | LOGITECH | tidak ditemukan | Pembelian | 1,500,000 |
| 193. | 2004 | External CD/ DVD Drive (ROM) | SATA | tidak ditemukan | Pembelian | 4,400,000 |
| 194. | 2011 | External/ Portable Hardisk | TOSHIBA / 5 G | tidak ditemukan | Pembelian | 750,000 |
| 195. | 2004 | Peralatan Personal Komputer lainnya | BARATA | tidak ditemukan | Pembelian | 4,000,000 |
| 196. | 2007 | Peralatan Personal Komputer lainnya | ADVANCE | tidak ditemukan | Pembelian | 100,000 |
| 197. | 2007 | Peralatan Personal Komputer lainnya | ADVANCE / - | tidak ditemukan | Pembelian | 95,000 |
| 198. | 2009 | Peralatan Personal Komputer lainnya | ADVANCE | tidak ditemukan | Pembelian | 100,000 |
| 199. | 2010 | Peralatan Personal Komputer lainnya | ICA / 1082 B | tidak ditemukan | Pembelian | 2,450,000 |
| 200. | 2013 | Peralatan Personal Komputer lainnya | BARATA | tidak ditemukan | Pembelian | 1,500,000 |
| 201. | 2013 | Peralatan Personal Komputer lainnya | ICA | tidak ditemukan | Pembelian | 1,450,000 |
| 202. | 2005 | Peralatan Jaringan lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 1,500,000 |
| 203. | 2006 | Peralatan Jaringan lainnya | - | tidak ditemukan | Pembelian | 25,000,000 |
| 204. | 2007 | Peralatan Komputer lainnya | D-LINK | tidak ditemukan | Pembelian | 1,260,000 |
| 205. | 2013 | Peralatan Komputer lainnya | SATA | tidak ditemukan | Pembelian | 700,000 |
| 206. | 2007 | Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi | - | tidak ditemukan | Pembelian | 750,000 |
| 207. | 2006 | Buku Umum Lain-lain | - | tidak ditemukan | Pembelian | 6,000,000 |
| 208. | 2010 | Buku Umum Lain-lain | - | tidak ditemukan | Pembelian | 500,000 |
| 209. | 2010 | Buku Umum Lain-lain | - | tidak ditemukan | Pembelian | 1,000,000 |
| 210. | 2010 | Buku Umum Lain-lain | - | tidak ditemukan | Pembelian | 1,000,000 |
| 211. | 2011 | Buku Umum Lain-lain | - | tidak ditemukan | Pembelian | 2,075,000 |
| 212. | 2011 | Buku Umum Lain-lain | - | tidak ditemukan | Pembelian | 200,000 |
| 213. | 2011 | Buku Umum Lain-lain | - | tidak ditemukan | Pembelian | 225,000 |
| 214. | 2012 | Buku Umum Lain-lain | - | tidak ditemukan | Pembelian | 425,000 |
| 215. | 2012 | Buku Umum Lain-lain | - | tidak ditemukan | Pembelian | 975,000 |
| 216. | 2012 | Buku Umum Lain-lain | - | tidak ditemukan | Pembelian | 250,000 |
| 217. | 2012 | Buku Umum Lain-lain | - | tidak ditemukan | Pembelian | 100,000 |
| 218. | 2007 | Lukisan lain-lain | - | tidak ditemukan | Pembelian | 500,000 |
| 219. | 1994 | Logam (Gong, Mandau) | - | tidak ditemukan | Pembelian | 140,000 |

## Tabel 2. 7 Jumlah Barang Dengan Kondisi Yang Rusak Berat

| NO | TAHUN | NAMA BARANG | MERK | KONDISI | PEROLEHAN | HARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) | Brother | rusak berat | Pembelian | 1,750,000 |
| 2 | 2013 | Mesin Absensi | fingersport/HYBRID SERIES | Rusak Berat | Pembelian | 23,512,500 |
| 3 | 2013 | Mesin Absensi | finger sport | Rusak Berat | Pembelian | 29,500,000 |
| 4 | 2013 | Mesin Absensi | fingersport/HYBRID SERIES | Rusak Berat | Pembelian | 164,587,500 |
| 5 | 2019 | Mesin Absensi | finger sport | Rusak Berat | Pembelian | 36,953,400 |
| 6 | 2008 | Papan Pengumuman | - | RUSAK BERAT | Pembelian | 26,730,000 |
| 7 | 2008 | Meja Kerja Kayu | - | Rusak Berat | Pembelian | 1,000,000 |
| 8 | 2009 | Meja 1/2 Biro | - | Rusak Berat | Hibah | 3,600,000 |
| 9 | 2010 | Meja 1/2 Biro | - | Rusak Berat | Hibah | 8,920,000 |
| 10 | 2010 | Meja 1/2 Biro | - / - | Rusak Berat | Hibah | 3,850,000 |
| 11 | 2012 | Kursi Biasa | Falaz | Rusak Berat | Pembelian | 450,000 |
| 12 | 2008 | Lemari Es | sanyo / emeral | Rusak Berat | Pembelian | 1,500,000 |
| 13 | 2010 | Kursi Kerja Pejabat lainnya | - | Rusak Berat | Hibah | 1,160,000 |
| 14 | 2010 | Telephone (PABX) | Panasonic / KX | RUSAK BERAT | Pembelian | 5,950,000 |
| 15 | 2011 | Lap Top | DELL XPS / JBL | Rusak Berat | Pembelian | 34,540,000 |
| 16 | 2013 | Lap Top | ACER / V5-471G | Rusak Berat | Pembelian | 56,050,000 |
| 17 | 2013 | Lap Top | TOSHIBA / L.635 | Rusak Berat | Pembelian | 7,400,000 |
| 18 | 2013 | Lap Top | SONY/VAIO / E Series | Rusak Berat | Pembelian | 9,275,000 |
| 19 | 2013 | Lap Top | AXIO / NEON RNW 123 | Rusak Berat | Pembelian | 5,300,000 |
| 20 | 2016 | Lap Top | LENOVO / THINGPAD YOGA 20 DLOYID-8G | Rusak Berat | Pembelian | 23,975,000 |
| 21 | 2018 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | FUJITSU ( FI 7240 ) | Rusak Berat | Pembelian | 24,344,800 |
| 22 | 2014 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON / ip 2770/modif | RUSAK BERAT | Pembelian | 1,500,000 |
| 23 | 2017 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | BROTHER / HL-L8250CDN | Rusak Berat | Pembelian | 6,955,200 |
| 24 | 2017 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / L 565 | Rusak Berat | Pembelian | 4,350,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2017 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / AL- M200 DN | Rusak Berat | Pembelian | 2,595,800 |
| 26 | 2017 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | canon / LBP 251 DW | RUSAK BERAT | Pembelian | 5,700,640 |
| 27 | 2018 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON | RUSAK BERAT | Pembelian | 4,449,800 |
| 28 | 2015 | Router | ROUTER | Rusak Berat | Pembelian | 9,700,000 |
| 29 | 2014 | Peralatan Komputer lainnya | - | Rusak Berat | Pembelian | 10,850,000 |
| | | | | | | |

**Tabel 2. 8 Jumlah Barang Dengan Kondisi Yang Baik**

| NO | TAHUN | NAMA BARANG | MERK | KONDISI | PEROLEHAN | HARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1954 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | - | Baik | Pembelian | 45,820,000 |
| 2 | 1954 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | - | Baik | Pembelian | 18,433,333 |
| 3 | 1954 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | - | Baik | Pembelian | 120,080,000 |
| 4 | 2014 | Transportable Generating Set | Lokal | Baik | Pembelian | 58,000,000 |
| 5 | 2015 | Portable Generating Set | genset/honda 5 KVA / OG 6000 lX | Baik | Pembelian | 25,000,000 |
| 6 | 2008 | Station Wagon | ISUZU / PANTHER TBR 541LS25MTFTGM | Baik | Hibah | 186,600,000 |
| 7 | 2008 | Station Wagon | suzuki / GC415V.NEW APV ARENA GL | Baik | Hibah | 131,175,000 |
| 8 | 2008 | Station Wagon | ISUZU / PANTHER | Baik | Pembelian | 169,500,000 |
| 9 | 2008 | Station Wagon | ISUZU / PANTHER | Baik | Pembelian | 162,900,000 |
| 10 | 2014 | Station Wagon | Toyota / AVANSA 1.3 E/MT | Baik | Pembelian | 151,730,000 |
| 11 | 2015 | Station Wagon | ford New Everts | Baik | Pembelian | 401,650,000 |
| 12 | 2017 | STATION WAGON | TOYOTA/INOVA | BAIK | HIBAH | 425,590,000 |
| 13 | 2002 | Sepeda Motor | Honda / win | Baik | Hibah | 6,600,000 |
| 14 | 2002 | Sepeda Motor | HONDA / WIN | Baik | Hibah | 6,600,000 |
| 15 | 2005 | Sepeda Motor | suzuki/smash / FD 110 | Baik | Hibah | 10,367,500 |
| 16 | 2005 | Sepeda Motor | suzuki / smash | Baik | Hibah | 10,312,500 |
| 17 | 2006 | Sepeda Motor | SUZUKI / FD110 | Baik | Hibah | 10,890,000 |
| 18 | 2007 | Sepeda Motor | SUZUKI / FK110 SD K6 | Baik | Hibah | 11,275,000 |
| 19 | 2007 | Sepeda Motor | suzuki new smash / smash | Baik | Hibah | 11,275,000 |
| 20 | 2008 | Sepeda Motor | suzuki smash / FDk6 | Baik | Hibah | 11,495,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2008 | Sepeda Motor | SUZUKI / SMASH FK 110 SDK 6 | Baik | Hibah | 11,495,000 |
| 22 | 2010 | Sepeda Motor | SUZUKI / SHOGUN | Baik | Hibah | 13,700,000 |
| 23 | 2011 | Sepeda Motor | SUZUKI / SHOGUN AXELO | Baik | Hibah | 14,300,000 |
| 24 | 2013 | Sepeda Motor | SUZUKI/AXELO / FL 125 RCD | Baik | Hibah | 15,180,000 |
| 25 | 2013 | Sepeda Motor | SUZUKI/AXELO / FL 125 RCD | Baik | Hibah | 15,180,000 |
| 26 | 2012 | alat pengolahan tanah dan tanaman MESIN POTONG RUMPUT | Honda | Baik | Pembelian | 6,475,000 |
| 27 | 2012 | Mesin Hitung Listrik | BROTHER | Baik | Hibah | 6,525,000 |
| 28 | 2012 | Lemari Besi/Metal | Brother | Baik | Pembelian | 4,750,000 |
| 29 | 2012 | Lemari Besi/Metal | brother | Baik | Pembelian | 3,685,000 |
| 30 | 2014 | Lemari Besi/Metal | BROTHER | Baik | Pembelian | 5,000,000 |
| 31 | 2015 | Lemari Besi/Metal | Tiger FC - G2/E9 90x40x185 / FC - G2/E9 | Baik | Pembelian | 5,200,000 |
| 32 | 2015 | Lemari Besi/Metal | Tiger FC -G2 /E9 90x40x90 | Baik | Pembelian | 1,450,000 |
| 33 | 2017 | Lemari Besi/Metal | brother | Baik | Pembelian | 4,400,000 |
| 34 | 2019 | Lemari Besi/Metal | asahi / acf e 18 | Baik | Pembelian | 14,850,000 |
| 35 | 2019 | Lemari Besi/Metal | ASAHI / ACF A 18 | Baik | Pembelian | 14,520,000 |
| 36 | 2021 | Lemari Besi/Metal | AD 025A | Baik | Pembelian | 2,816,000 |
| 37 | 2011 | Lemari Kayu | - / - | Baik | Pembelian | 2,200,000 |
| 38 | 2013 | Lemari Kayu | ORBITREND | Baik | Pembelian | 15,600,000 |
| 39 | 2014 | Lemari Kayu | - | Baik | Pembelian | 3,200,000 |
| 40 | 2015 | Lemari Kayu | Lemari Arsip Rak Kayu 120x40x80 cm | Baik | Pembelian | 2,400,000 |
| 41 | 2017 | Lemari Kayu | - | Baik | Pembelian | 50,180,000 |
| 42 | 2015 | Rak Besi | BROTHER | Baik | Pembelian | 27,650,000 |
| 43 | 2011 | Filing Cabinet Besi | BROTHER / - | Baik | Pembelian | 2,500,000 |
| 44 | 2019 | Filing Cabinet Besi | ASAHI / ACP D 4A | Baik | Pembelian | 7,700,000 |
| 45 | 2012 | Brandkas | DHAINICI | Baik | Pembelian | 14,925,000 |
| 46 | 2015 | Lemari Sorok | - | Baik | Pembelian | 15,000,000 |
| 47 | 2015 | Lemari Sorok | TIGER | Baik | Pembelian | 2,400,000 |
| 48 | 2014 | Lemari Kaca | BROTHER | Baik | Pembelian | 7,375,000 |
| 49 | 2018 | CCTV - Camera Control Television System | SONY | Baik | Pembelian | 7,975,500 |
| 50 | 2020 | CCTV - Camera Control Television System | - | Baik | Pembelian | 17,500,000 |
| 51 | 2014 | White Board | Wijaya | Baik | Pembelian | 10,000,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2009 | Alat Penghancur Kertas | ATC | Baik | Pembelian | 7,000,000 |
| 53 | 2014 | Alat Penghancur Kertas | GEMET | Baik | Pembelian | 11,880,000 |
| 54 | 2018 | Alat Penghancur Kertas | HSM PURE | Baik | Pembelian | 4,455,035 |
| 55 | 2020 | Alat Penghancur Kertas | HSM / PS 22452 | Baik | Pembelian | 5,500,000 |
| 56 | 2014 | Alat Pemotong Kertas | Vtec / VT-1815 | Baik | Pembelian | 4,995,000 |
| 57 | 2015 | Laser Pointer | SONY | Baik | Pembelian | 500,000 |
| 58 | 2012 | Alat Kantor Lainnya ALAT POTONG KERTAS | Vtec | Baik | Pembelian | 2,475,000 |
| 59 | 2017 | Alat Kantor Lainnya (Kursi Tamu Enkel ) | ALLIA FURNITURE | Baik | Pembelian | 24,883,650 |
| 60 | 2013 | Meja Kerja Besi/Metal | BROTHER | Baik | Pembelian | 12,919,500 |
| 61 | 2008 | Meja Kerja Kayu | - | Baik | Pembelian | 1,000,000 |
| 62 | 2017 | Meja Kerja Kayu | - | Baik | Pembelian | 145,768,500 |
| 63 | 2010 | Kursi Besi/Metal | BROTHER | Baik | Hibah | 5,600,000 |
| 64 | 2014 | Kursi Besi/Metal | Kursi pernekel gajah mas H-50 / H-50 | Baik | Pembelian | 10,120,000 |
| 65 | 2017 | Kursi Besi/Metal ( Kursi Tunggu ) | BROTHER | Baik | Pembelian | 6,820,000 |
| 66 | 2019 | Kursi Besi/Metal ( Kursi Kuliah ) | taqyu | Baik | Pembelian | 22,880,000 |
| 67 | 2022 | Kursi Besi/Metal | DAYTONA | Baik | Pembelian | 11,375,000 |
| 68 | 2010 | Tempat Tidur Kayu | - | Baik | Hibah | 76,560,000 |
| 69 | 2010 | Tempat Tidur Kayu | - | Baik | Hibah | 2,976,000 |
| 70 | 2013 | Tempat Tidur Kayu | bella / spring bed | Baik | Pembelian | 62,720,000 |
| 71 | 2020 | Tempat Tidur Kayu | - | Baik | Pembelian | 99,748,000 |
| 72 | 2017 | Meja Resepsionis | - | Baik | Pembelian | 15,950,000 |
| 73 | 2022 | Meja Sekolah | - | Baik | Pembelian | 21,000,000 |
| 74 | 2014 | Meja 1/2 Biro | - | Baik | Pembelian | 2,975,000 |
| 75 | 2014 | Kasur/Spring Bed | EAGLE | Baik | Pembelian | 2,420,000 |
| 76 | 2019 | Kasur/Spring Bed | maximum foam | Baik | Pembelian | 79,200,000 |
| 77 | 2010 | Kursi Tamu | - | Baik | Hibah | 8,975,000 |
| 78 | 2011 | Kursi Tamu | - | Baik | Hibah | 8,400,000 |
| 79 | 2017 | Kursi Tamu | - | Baik | Pembelian | 54,120,000 |
| 80 | 2018 | Kursi Putar | ASAHI / AM-4370 | Baik | Pembelian | 33,148,500 |
| 81 | 2013 | Meubeleur lainnya | BONITA / seprei+sarung bantal+sarung guling | Baik | Pembelian | 7,680,000 |
| 82 | 2018 | Meubeleur lainnya/ | - | Baik | Pembelian | 6,221,600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2018 | Meubeleur lainnya | - | Baik | Pembelian | 22,550,000 |
| 84 | 2018 | Meubeleur lainnya | BONITA | Baik | Pembelian | 14,000,000 |
| 85 | 2018 | Meubeleur lainnya | - | Baik | Pembelian | 38,664,470 |
| 86 | 2018 | Meubeleur lainnya | - | Baik | Pembelian | 134,936,100 |
| 87 | 2019 | Meubeleur lainnya | - | Baik | Pembelian | 16,280,000 |
| 88 | 2019 | Meubeleur lainnya | - | Baik | Pembelian | 8,470,000 |
| 89 | 2014 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | electroluc / ZBA | Baik | Pembelian | 2,200,000 |
| 90 | 2014 | Lemari Es | SHARP | Baik | Pembelian | 1,875,000 |
| 91 | 2019 | Lemari Es | polytron / pra 18 gov | Baik | Pembelian | 2,640,000 |
| 92 | 2011 | A.C. Window | Panasonic | Baik | Pembelian | 14,950,000 |
| 93 | 2011 | A.C. Window | PANASONIC | Baik | Hibah | 5,480,000 |
| 94 | 2013 | A.C. Window | panasonic | Baik | Pembelian | 10,840,000 |
| 95 | 2013 | A.C. Window | panasonic | Baik | Pembelian | 7,625,000 |
| 96 | 2013 | A.C. Window | panasonic | Baik | Pembelian | 12,980,000 |
| 97 | 2013 | A.C. Window | LG / EER 3.20 W | Baik | Hibah | 5,775,000 |
| 98 | 2015 | A.C. Window | panasonic / PN 18 RKV | Baik | Pembelian | 16,500,000 |
| 99 | 2018 | A.C. Window | PANASONIC | Baik | Pembelian | 34,650,000 |
| 100 | 2012 | A.C. Split | Panasonic | Baik | Pembelian | 6,950,000 |
| 101 | 2013 | A.C. Split | panasonic | Baik | Pembelian | 56,100,000 |
| 102 | 2015 | A.C. Split | SAMSUNG | Baik | Pembelian | 4,500,000 |
| 103 | 2020 | A.C. Split | PANASONIC | Baik | Pembelian | 46,800,000 |
| 104 | 2021 | A.C. Split | DAIKIN / R32FTKV25NVM4 | Baik | Pembelian | 16,256,000 |
| 105 | 2022 | A.C. Split | POLYTRON | Baik | Pembelian | 18,080,000 |
| 106 | 2009 | Kipas Angin | TORNADO REGENCY | Baik | Hibah | 2,400,000 |
| 107 | 2013 | Exhause Fan | PANASONIC | Baik | Pembelian | 1,000,000 |
| 108 | 2014 | Exhause Fan | PANASONIC / PV-30RUN5 | Baik | Pembelian | 990,000 |
| 109 | 2008 | Televisi | SAMSUNG | Baik | Hibah | 5,700,000 |
| 110 | 2013 | Televisi | LG / 29 FG4 RL | Baik | Pembelian | 7,400,000 |
| 111 | 2014 | Televisi | samsung / LED | Baik | Pembelian | 4,600,000 |
| 112 | 2016 | Televisi | samsung / UA32J4003ARXXD | Baik | Pembelian | 3,124,000 |
| 113 | 2020 | Televisi | SAMSUNG / SERIES 50 RU 7400 | Baik | Pembelian | 29,250,000 |
| 114 | 2020 | Televisi | SONY / SERIES X9500G | Baik | Pembelian | 57,650,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 2021 | Televisi | SAMSUNG / SMART HOSPYTAL | Baik | Pembelian | 25,600,000 |
| 116 | 2014 | Sound System | TARGA / BS 1511 AK | Baik | Pembelian | 5,400,000 |
| 117 | 2016 | Camera Video | CANON / EOS M 3 KIT | Baik | Pembelian | 7,920,000 |
| 118 | 2017 | Camera Digital | NIKON / 5300 | Baik | Pembelian | 7,920,000 |
| 119 | 2013 | Dispenser | MIYAKO | Baik | Pembelian | 280,000 |
| 120 | 2020 | Dispenser | sv / sv md-042 pas | Baik | Pembelian | 4,000,000 |
| 121 | 2015 | Handy Cam | SONY / HDR-PJ 410 + Tripod | Baik | Pembelian | 7,980,350 |
| 122 | 2017 | Karpet | WALL TO WALL | Baik | Pembelian | 78,282,820 |
| 123 | 2009 | Gordyin/Kray | - | Baik | Pembelian | 9,345,385 |
| 124 | 2013 | Gordyin/Kray | BLINDS / 1 set | Baik | Pembelian | 35,000,000 |
| 125 | 2018 | Gordyin/Kray | BLINDS | Baik | Pembelian | 20,000,000 |
| 126 | 2018 | Gordyin/Kray | BLINDS | Baik | Pembelian | 10,465,070 |
| 127 | 2020 | Gordyin/Kray | tucson | Baik | Pembelian | 26,000,000 |
| 128 | 2016 | Alat Rumah Tangga Lain-lain ( CANGKIR ) | - | Baik | Pembelian | 975,000 |
| 129 | 2017 | Alat Rumah Tangga Lain-lain/WALL PAPER | - | Baik | Pembelian | 4,950,000 |
| 130 | 2018 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | - | Baik | Pembelian | 48,520,725 |
| 131 | 2017 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | - | Baik | Pembelian | 26,510,000 |
| 132 | 2021 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | - | Baik | Pembelian | 18,875,000 |
| 133 | 2017 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | - | Baik | Pembelian | 44,000,000 |
| 134 | 2021 | Meja Kerja Pejabat lain-lainMEJA KURSI TAMU | - | Baik | Pembelian | 22,750,000 |
| 135 | 2021 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | - | Baik | Pembelian | 8,335,000 |
| 136 | 2014 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Ergotec / ERGOTEC GA21TR | Baik | Pembelian | 6,820,000 |
| 137 | 2015 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Indachi dizel I-S AL HDT / I-S Al HDT | Baik | Pembelian | 15,600,000 |
| 138 | 2014 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | ergotec GA21PR / /ergotec GA21PR | Baik | Pembelian | 6,050,000 |
| 139 | 2015 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | Indachi BUGATE I AL HDT / BUGATE I AL HDT | Baik | Pembelian | 30,400,000 |
| 140 | 2017 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | asahi | Baik | Pembelian | 5,775,000 |
| 141 | 2019 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | ergotex ga 21 tr | Baik | Pembelian | 4,620,000 |
| 142 | 2013 | Kursi Kerja Pejabat lainnya Kursi Besi | dainici | Baik | Pembelian | 4,800,000 |
| 143 | 2017 | Kursi Kerja Pejabat lainnya | ASAHI | Baik | Pembelian | 61,055,500 |
| 144 | 2019 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II | ergotex lx 958 pr | Baik | Pembelian | 9,240,000 |
| 145 | 2017 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II | ALLIA FURNITURE | Baik | Pembelian | 39,160,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 2015 | Buffet Kaca | BROTHER | Baik | Pembelian | 5,000,000 |
| 147 | 2018 | Professional Sound System | TITANIUM YAMAHA | Baik | Pembelian | 66,000,000 |
| 148 | 2011 | Audio Cassette Recorder | TOA | Baik | Pembelian | 13,585,000 |
| 149 | 2014 | Video Monitor ( CCTV ) | - | Baik | Pembelian | 21,250,000 |
| 150 | 2014 | Slide Projector | EPSON / EB 435 W | Baik | Pembelian | 83,080,000 |
| 151 | 2021 | Lensa Kamera | logitech | Baik | Pembelian | 24,497,000 |
| 152 | 2016 | Layar Film/Projector | EPSON / EB-W31 | Baik | Pembelian | 7,600,000 |
| 153 | 2019 | Layar Film/LCD Projector | EPSON / EB X 450 | Baik | Pembelian | 14,520,000 |
| 154 | 2019 | Layar Film/Projector | ASUS / S1 | Baik | Pembelian | 8,800,000 |
| 155 | 2021 | Alat Studio Lainnya ( KAMERA ZOOM ) | LOGITECH | Baik | Pembelian | 19,218,000 |
| 156 | 2021 | Alat Studio Lainnya | DVR KIT / 4 CH674 HDM | Baik | Pembelian | 19,769,250 |
| 157 | 2021 | Alat Studio Lainnya | CANON / EOS 200 | Baik | Pembelian | 15,112,000 |
| 158 | 2021 | Alat Studio Lainnya | primatech / pro fx8 audio mixer | Baik | Pembelian | 3,778,750 |
| 159 | 2015 | Telephone (PABX) | PANASONIC / KX TES 824 | Baik | Pembelian | 27,970,900 |
| 160 | 2019 | alat komunikasi telephone lainnya (Perkam Suara ) | SONY / ICD-PX240 | Baik | Pembelian | 1,650,000 |
| 161 | 2017 | peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst) | SONY | Baik | Pembelian | 8,000,000 |
| 162 | 2019 | Bel Listrik | SONY | Baik | Pembelian | 3,245,000 |
| 163 | 2017 | Komputer Jaringan lainnya( KOMPUTER SERVER) | DELL / Poweredge | Baik | Pembelian | 42,438,500 |
| 164 | 2018 | Komputer Jaringan lainnya( KOMPUTER SERVER) | dell power edge | Baik | Pembelian | 56,826,000 |
| 165 | 2018 | Komputer Jaringan lainnya( KOMPUTER SERVER) | POWER EDGE / R 730 XEON ES | Baik | Pembelian | 52,255,400 |
| 166 | 2016 | P.C Unit | ASUS / M32iD INTER CORE i7 | BAIK | Pembelian | 16,600,000 |
| 167 | 2018 | P.C Unit | DELL INSPERON / 3064 (2x0r0W-22 ) | Baik | Pembelian | 7,494,000 |
| 168 | 2018 | P.C Unit | ASUS | Baik | Pembelian | 15,053,200 |
| 169 | 2010 | Lap Top | Toshiba + laser pointer / i5-s20 | Baik | Pembelian | 19,250,000 |
| 170 | 2013 | Lap Top | ASUS / VIVO BOOKX202E: CBNOCS 11640481 | Baik | Pembelian | 9,456,000 |
| 171 | 2013 | Lap Top | SONY/VAIO / E Series | Baik | Pembelian | 9,275,000 |
| 172 | 2014 | Lap Top | TOSHIBA SATELIT / L 40 | Baik | Pembelian | 7,500,000 |
| 173 | 2014 | Lap Top | LENOVO | Baik | Pembelian | 9,500,000 |
| 174 | 2014 | Lap Top | DELL INSPIRO | Baik | Pembelian | 11,950,000 |
| 175 | 2014 | Lap Top | HP 1000 / 1000 | Baik | Pembelian | 9,500,000 |
| 176 | 2014 | Lap Top | DELL / Insperon 14R 5437 | Baik | Pembelian | 11,220,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 2015 | Lap Top | ASUS / UX 303 R4352 H | Baik | Pembelian | 51,000,000 |
| 178 | 2015 | Lap Top | laptop/asus A455LN-WX / ASUS | Baik | Pembelian | 9,000,000 |
| 179 | 2015 | Lap Top | LAPTOP/DELL INSPIRON / 5447i3-4030 U | Baik | Pembelian | 9,000,000 |
| 180 | 2015 | Lap Top | Dell vostron 5480 / 5480 | Baik | Pembelian | 9,914,000 |
| 181 | 2015 | Lap Top | DELL | Baik | Pembelian | 9,389,000 |
| 182 | 2015 | Lap Top | ASUS / A 455 LF | Baik | Pembelian | 8,700,000 |
| 183 | 2016 | Lap Top | ASUS / A 445 UR INTER CORE i5 - 6200 | Baik | Pembelian | 28,725,000 |
| 184 | 2016 | Lap Top | LENOVO / THINGPAD EDGE E460 O41 D CORE i7 | Baik | Pembelian | 14,100,000 |
| 185 | 2017 | Lap Top | ASUS / A.44.2U | Baik | Pembelian | 86,166,600 |
| 186 | 2018 | Lap Top | HP 240G | Baik | Pembelian | 25,253,200 |
| 187 | 2018 | Lap Top | DELL INSPERON / 13 5379 i7 | Baik | Pembelian | 28,146,280 |
| 188 | 2018 | Lap Top | DELL INSPERON / 143567 | Baik | Pembelian | 11,763,575 |
| 189 | 2018 | Lap Top | HP PAVILION / X36014 | Baik | Pembelian | 12,865,156 |
| 190 | 2018 | Lap Top | ACER PREDATOR | Baik | Pembelian | 14,268,300 |
| 191 | 2019 | Lap Top | hp / pavilion x360-dh 1006tx | Baik | Pembelian | 42,230,000 |
| 192 | 2019 | Lap Top | LENOVO / YOGA 530-14TKB | Baik | Pembelian | 34,106,400 |
| 193 | 2019 | Lap Top | hp omen / ce523TXi7-7700 HQ | Baik | Pembelian | 16,892,000 |
| 194 | 2019 | Lap Top | hp / pavilion x360 dh 003tx | Baik | Pembelian | 12,000,000 |
| 195 | 2020 | Lap Top | ASUS / ROG STRIK III | Baik | Pembelian | 17,850,000 |
| 196 | 2021 | Lap Top | LENOVO i7 / V14G2 ITL | Baik | Pembelian | 74,948,000 |
| 197 | 2021 | Lap Top | HP / INC240G8 | Baik | Pembelian | 109,308,000 |
| 198 | 2021 | Lap Top | ASUS | Baik | Pembelian | 203,430,000 |
| 199 | 2021 | Lap Top | HP / 1065G7 | Baik | Pembelian | 364,360,000 |
| 200 | 2022 | Lap Top | ASUS / P151CEA | Baik | Pembelian | 20,218,000 |
| 201 | 2012 | Note Book | ACER / ASPIRE 4752 | Baik | Pembelian | 9,975,000 |
| 202 | 2022 | Note Book | asus / b1400cepe | Baik | Pembelian | 16,885,000 |
| 203 | 2019 | Personal Komputer TABLET | samsung / galaxy tab s 4 | Baik | Pembelian | 11,000,000 |
| 204 | 2018 | peralatan mainframe lainnya (dst) | TOSHIBA | Baik | Pembelian | 27,000,000 |
| 205 | 2018 | peralatan mainframe lainnya (dst) | ACER | Baik | Pembelian | 7,595,000 |
| 206 | 2014 | CPU (Peralatan Mini Komputer) | TOSHIBA / core i3 | Baik | Pembelian | 5,100,000 |
| 207 | 2015 | CPU (Peralatan Mini Komputer) | core i3 / core i3 -4130 ram ddr 3 4 gb | Baik | Pembelian | 6,389,500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 2013 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | canon / DR2020 V | Baik | Pembelian | 34,232,000 |
| 209 | 2013 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | canon / P 215 | Baik | Pembelian | 3,960,000 |
| 210 | 2015 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | HP / G 3110 | Baik | Pembelian | 2,100,000 |
| 211 | 2017 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | PANASONIC / KVN 1015 C | Baik | Pembelian | 7,775,060 |
| 212 | 2018 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | HONEYWELL MK 7580 | Baik | Pembelian | 3,025,000 |
| 213 | 2019 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | CANON / P-20811 | Baik | Pembelian | 3,410,000 |
| 214 | 2015 | Peralatan Minikomputer lainnya | SONY | Baik | Pembelian | 43,850,000 |
| 215 | 2017 | Peralatan Minikomputer lainnya | SONY | Baik | Pembelian | 3,000,000 |
| 216 | 2018 | Peralatan Minikomputer lainnya | KARSPERSKY / KSOS-20-2 | Baik | Pembelian | 5,965,000 |
| 217 | 2018 | Monitor | LG / IPS LED 22 | Baik | Pembelian | 4,006,250 |
| 218 | 2012 | Printer | BROTHER / Mfc J 6710 DW | BAIK | Pembelian | 7,500,000 |
| 219 | 2015 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | printer laser jet HP / mfp m 125 a hitam | Baik | Pembelian | 4,000,000 |
| 220 | 2015 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / L 360 | Baik | Pembelian | 5,500,000 |
| 221 | 2015 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / M 200 | Baik | Pembelian | 3,000,000 |
| 222 | 2015 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON L 350 / L 350 | Baik | Pembelian | 2,950,000 |
| 223 | 2017 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | epson / L 360 | Baik | Pembelian | 16,559,784 |
| 224 | 2017 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | epson | Baik | Pembelian | 2,759,966 |
| 225 | 2018 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | HP / LASER JET PRO MFP M 130 FW | Baik | Pembelian | 7,000,000 |
| 226 | 2018 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | HP | Baik | Pembelian | 13,946,000 |
| 227 | 2019 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / 3110 | Baik | Pembelian | 9,405,000 |
| 228 | 2019 | Printer LASER JET WARNA | HP / LASER JET PRO M154 A | Baik | Pembelian | 4,290,000 |
| 229 | 2019 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / 3110 | Baik | Pembelian | 4,345,000 |
| 230 | 2019 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / 3110 | Baik | Pembelian | 4,345,000 |
| 231 | 2019 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / 3110 | Baik | Pembelian | 4,345,000 |
| 232 | 2019 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / WORKFORCE WF 7711 | Baik | Pembelian | 6,490,000 |
| 233 | 2020 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / L 3150 | Baik | Pembelian | 6,998,800 |
| 234 | 2020 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / L 120 | Baik | Pembelian | 1,738,000 |
| 235 | 2020 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / L 5190 | Baik | Pembelian | 4,059,000 |
| 236 | 2021 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | BROTHER / MFCT810W | Baik | Pembelian | 10,478,000 |
| 237 | 2021 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / L 3110 | Baik | Pembelian | 25,450,000 |
| 238 | 2014 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | SCANER / EPSON GT 2500 | Baik | Pembelian | 23,430,000 |
| 239 | 2016 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | PLUSTEKMART OFFICE / PL 2550 | Baik | Pembelian | 12,800,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2019 | Scanner BARCODE | HONYWELL / MK 7580 | Baik | Pembelian | 6,490,000 |
| 241 | 2020 | External/ Portable Hardisk | orico / HDD ENCLOSURE | Baik | Pembelian | 1,000,000 |
| 242 | 2021 | External/ Portable Hardisk | SEAGATE | Baik | Pembelian | 3,648,000 |
| 243 | 2021 | External/ Portable Hardisk | orico / hddenclosure | Baik | Pembelian | 1,300,000 |
| 244 | 2018 | Peralatan Personal Komputer lainnya | MIKROVISION | Baik | Pembelian | 9,354,600 |
| 245 | 2018 | Peralatan Personal Komputer lainnya ( LCD PROYEKTOR ) | ACER | Baik | Pembelian | 14,850,000 |
| 246 | 2020 | Server | POWER EDGE / R440 SILVER4210/4X16 GB/2X1.2 | Baik | Pembelian | 348,656,000 |
| 247 | 2018 | Modem | TP LINK M  7350,4GLT MOBILE WIFI | Baik | Pembelian | 1,182,500 |
| 248 | 2019 | Modem | huawei / e 5573 | Baik | Pembelian | 1,400,000 |
| 249 | 2019 | Genset | HONDA / EXCEL SF 700 DXE | Baik | Pembelian | 14,410,000 |
| 250 | 1954 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | - | Baik | Pembelian | 77,354,319 |
| 251 | 1996 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | - | Baik | Pembelian | 37,820,000 |
| 252 | 1996 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | - | Baik | Pembelian | 50,426,667 |
| 253 | 1996 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | - | Baik | Pembelian | 45,384,000 |
| 254 | 1954 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | - | Baik | Pembelian | 49,412,224 |
| 255 | 1954 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | - | Baik | Pembelian | 968,848,637 |
| 256 | 2009 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | - | Baik | Pembelian | 389,090,000 |
| 257 | 2013 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | - | Baik | Pembelian | 39,500,000 |
| 258 | 1954 | Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen | - | Baik | Pembelian | 63,000,586 |
| 259 | 1954 | Gedung Olah Raga Tetutup Permanen | - | Baik | Pembelian | 97,888,887 |
| 260 | 1954 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | - | Baik | Pembelian | 138,971,880 |
| 261 | 1954 | Gedung Garasi/Pool Semi Permanen | - | Baik | Pembelian | 8,894,200 |
| 262 | 2008 | Gedung Garasi/Pool Semi Permanen | - | Baik | Hibah | 321,179,800 |
| 263 | 1954 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | - | Baik | Pembelian | 20,073,716 |
| 264 | 1954 | Asrama Semi Permanen | - | Baik | Pembelian | 239,519,002 |
| 265 | 2009 | Tugu Peringatan Lainnya | - | Baik | Hibah | 47,635,450 |
| 266 | 2006 | Pagar Permanen | - | Baik | Hibah | 280,113,600 |
| 267 | 2017 | Tanaman Perkebunan ( BUNGA HIDUP ) | - | Baik | Pembelian | 2,500,000 |
| 268 | 2022 | Kursi Besi/Metal | DAYTONA | Baik | Pembelian | 11,375,000 |
| 269 | 2022 | Meja Sekolah | - | Baik | Pembelian | 21,000,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 2022 | A.C. Split | POLYTRON | Baik | Pembelian | 18,080,000 |
| 271 | 2022 | Lap Top | ASUS / P151CEA | Baik | Pembelian | 20,218,000 |
| 272 | 2022 | Note Book | asus / b1400cepe | Baik | Pembelian | 16,885,000 |
| 273 | 2022 | Note Book | ASUS / P1512CEA | Baik | Pembelian | 20,218,000 |
| 274 | 2022 | Note Book | ASUS / B3402FEA | Baik | Pembelian | 20,218,000 |
| 275 | 2023 | Note Book | TRAVELMATE P214 /ACER | Baik | Pembelian | 115,680,000 |
| 276 | 2023 | AC 2 PK | PANASONIC YN-18WKJ | Baik | Pembelian | 73,100,000 |
| 277 | 2023 | AC 1/5 PK | POLYTRON PAC 05VH | Baik | Pembelian | 28,710,000 |
| 278 | 2023 | SPEKER AKTIF PAS 8C28 | POLYTRON | Baik | Pembelian | 4,880,000 |
| 279 | 2023 | LCD PROYEKTOR | VIEWSONIC | Baik | Pembelian | 15,970,000 |
| 280 | 2023 | PRINTER | EPSON L 850 | Baik | Pembelian | 6,630,000 |
| 281 | 2023 | PRINTER | HP MFP137 FNW | Baik | Pembelian | 6,850,000 |
| 282 | 2023 | PRINTER | EPSON L 3210 | Baik | Pembelian | 16,750,000 |
| 283 | 2023 | PRINTER | EPSON L 5290 | BAIK | PEMBELIAN APBD | 9,878,000 |
| 284 | 2023 | AC 1/5 PK | POLYTRON PAC 05VH | Baik | Pembelian | 28,710,000 |
| 285 | 2023 | AC | PANASONIC/1 PK 09WKJ | BAIK | PEMBELIAN APBD | 17,750,000 |
| 286 | 2023 | SCANER | PLUSTEK OPTICSLIM | BAIK | PEMBELIAN APBD | 19,005,000 |
| 287 | 2023 | PRINTER | EPSON/L 121 | BAIK | PEMBELIAN APBD | 2,360,000 |
| 288 | 2023 | KOMPUTER ALL IN ONE i5/DESKTOP 8265U,4 GB,DDR 4 GEFORCE 930MX 2GB,HDD1TB LAYAR LED 21, 5 WIN 10 HOME | AXIOO MY PC ONE PRO K524 ( 16 NG ) | BAIK | PEMBELIAN APBD | 119,728,000 |
| 289 | 2023 | samsung galaxi tab s9 | samsung galaxi tab s9 fe plus 12/256gb | BAIK | PEMBELIAN APBD | 23,970,000 |
| 290 | 2023 | PORTABLE AMPLIFIER ( WERELESS ) | TOA ZV G10CB-AS | BAIK | PEMBELIAN APBD | 4,120,000 |
| 291 | 2023 | KURSI ESELON II ( CHAIRMAN KURSI DIREKTUR ) | ORCHARD PC9410A | BAIK | PEMBELIAN APBD | 6,825,000 |
| 292 | 2023 | MEJA RAPAT ( TABLE MODESTY PANEL ) | AQM0N | BAIK | PEMBELIAN APBD | 15,300,000 |
| 293 | 2023 | KURSI BESI ( KURSI RAPAT ) | CHROME BR - 700 TB | BAIK | PEMBELIAN | 22,900,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | APBD | |
| 294 | 2023 | MICROPHONE | WISDOM | BAIK | PEMBELIAN APBD | 5,960,000 |
| 295 | 2023 | LAPTOP | ACER | BAIK | PEMBELIAN APBD | - |
| 296 | 2023 | SCANER /epson | EPSON | BAIK | PEMBELIAN APBD | - |
| 297 | 2023 | PRINTER | CANON INJEK PIXMA TR 150 | BAIK | PEMBELIAN APBD | 8,800,000 |

### *2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*

Kinerja pelayanan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo pada periode sebelumnya (2020-2024) dengan menggunakan berbagai indikator. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran. Adapun Tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 2. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Periode Tahun 2020-2024

### Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo

| TUJUAN / SASARAN | Indikator | Total Nilai | Target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Thn 2020 | Thn 2021 | Thn 2022 | Thn 2023 | Thn 2024 | Thn 2020 | Thn 2021 | Thn 2022 | Thn 2023 | Thn 2024 | Thn 2020 | Thn 2021 | Thn 2022 | Thn 2023 | Thn 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (13) |
| **Mewujudkan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan profesionalitas ASN** | **Nilai IPASN** | **100** | **76** | **61** | **62** | **63** | | **50,46** | **63.82** | **77.35** | **77,17** | | **65.53** | **104.62** | **124.76** | **132.25%** | |
| | Nilai Dimensi Kualifikasi | 25 | 20 | 13.05 | 13.06 | 13.07 | | 13 | 13.04 | 21.37 | 21.33 | | 65.00 | 99.92 | 163.63 | 160.21 | |
| | Nilai Dimensi Kompetensi | 40 | 25 | 18.95 | 19.44 | 19.93 | | 9.12 | 20.74 | 25.8 | 25.66 | | 36.48 | 109.45 | 132.72 | 166.98 | |
| | Nilai Dimensi Kinerja | 30 | 27 | 24 | 24.5 | 25 | | 23.35 | 25.05 | 25.18 | 25.18 | | 86.48 | 104.38 | 102.78 | 96.40 | |
| | Nilai Dimensi Disiplin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 4.99 | 4.99 | 5.00 | 5.00 | | 99.80 | 99.80 | 100.00 | 100.00 | |
| 2. Meningkatnya Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP PD | 100 | 80 | 80 | 80,2 | 80,5 | | 80 | 80.60 | 80.96 | 81.16 | | 100 | 100,75 | 101,17 | 100.82 | |
| **Mewujudkan Tata kelola Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Sitem Merit** | Nilai Sistem Merit | | | | | | 309,9 | | | | | 323 | | | | | |
| Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemn ASN | Persentase capaian Sistem Merit | | | | | | 77.38 | | | | | 80.75 | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP BKPSDM | | | | | | 81 | | | | | 81.46 | | | | | 100.57 |

Sumber : BKPSDM Kab. Probolinggo

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian kinerja pada layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target IP ASN yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019-2023 pada tahun 2020: 76, tahun 2021: 61, tahun 2022: 62, tahun 2023: 63, dan tahun 2024 : 64.02 . Namun demikian, hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Probolinggo pada tahun 2020 belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni hanya mencapai 50,46 dengan kategori **sangat rendah**.

   Rendahnya capaian Indeks Profesionalitas ASN tersebut diantaranya karena:

   a) Perubahan parameter penilaian seiring dengan perubahan sistem penilaian dari manual menjadi online.
   b) Pengelolaan dimensi Indeks Profesionalitas ASN yang belum optimal :
      1. Dimensi pengembangan kompetensi;
      2. Dimensi kualifikasi pendidikan;
      3. Dimensi kinerja;
      4. Dimensi disiplin.
   c) Target Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 melebihi target yang ditetapkan. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 mengalami peningkatan pada nilai dimensi pengembangan kompetensi dikarenakan adanya peningkatan pelaporan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh masing-masing ASN. Meskipun demikian, capaian Indeks Profesionalitas ASN tersebut masih belum maksimal karena adanya beberapa permasalahan pada masing-masing dimensi, diantaranya :
      1. Dimensi Kualifikasi
         - Masih ada ASN yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai dengan jabatan.
         - Ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan bidang tugas yang dijalankan.
         - Sebagian ASN belum memiliki sertifikasi profesi yang relevan.
      2. Dimensi Kompetensi

- Program pelatihan/pengembangan kompetensi masih belum berbasis kebutuhan jabatan (belum optimal *training need analysis*).
- ASN belum sepenuhnya menguasai kompetensi digital dan teknologi informasi.
- Rotasi dan promosi belum sepenuhnya memperhatikan kompetensi individu.

3. Dimensi Kinerja
   - Penerapan manajemen kinerja belum berjalan optimal (sering masih bersifat administratif, bukan substantif).
   - Hasil kerja ASN belum sepenuhnya terukur dan berbasis output/outcome.
   - Kurangnya pembinaan dan coaching dari pimpinan untuk mendukung pencapaian kinerja.
4. Dimensi Disiplin
   - Masih ditemukan pelanggaran disiplin seperti keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, atau kurangnya kepatuhan pada aturan.
   - Penegakan disiplin belum dilakukan secara konsisten dan berkeadilan.
   - Integritas sebagian ASN masih perlu diperkuat, terutama terkait netralitas ASN dalam politik.

## Tabel 2. 10 Anggaran Dan Realisasi Selama Periode Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut ini :

| | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2,437,368,240 | | | | | 2,385,544,086 | | | | | 97.87 | | | | | 2,359,718,050 | 2,044,561,094 |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 240,063,800 | | | | | 232,044,213 | | | | | 96.66 | | | | | 418,969,920 | 386,589,974 |
| Program peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian | 915,081,400 | | | | | 901,178,265 | | | | | 98.48 | | | | | 898,376,900 | 817,024,220 |
| Program Pendidikan Kedinasan | 803,589,200 | | | | | 671,579,074 | | | | | 83.57 | | | | | 3,513,786,630 | 3,136,648,468 |
| Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian | 1,491,605,200 | | | | | 1,488,414,180 | | | | | 99.79 | | | | | 1,491,605,200 | 1,488,414,180 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 8,843,602,152 | 8,725,585,388 | 8,926,937,386 | 8,698,657,332 | | 7,905,338,880 | 7,694,000,740 | 8,143,471,696 | 5,642,202,329 | | 89.39 | 88.18 | 91.22 | 64.86 | 8,755,010,358 | 7,799,669,810 |
| Program Kepegawaian Daerah | | 2,882,254,460 | 3,148,665,200 | 2,629,996,870 | 2,062,026,521 | | 2,296,656,473 | 2,442,810,903 | 1,974,101,433 | 953,876,370 | | 79.68 | 77.58 | 75.06 | 46.26 | 2,898,208,720 | 2,369,733,688 |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | | 3,748,431,400 | 3,160,389,900 | 1,191,365,200 | 430,365,200 | | 3,328,684,407 | 2,681,032,780 | 1,171,811,384 | 401,632,805 | | 88.8 | 84.83 | 98.36 | 93.32 | 2,637,395,500 | 3,004,858,594 |

### *2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Probolinggo, maka identifikasi kelompok sasaran layanan menjadi aspek penting dalam penyusunan Rencana Strategis. Kelompok sasaran layanan merupakan pihak – pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Probolinggo. Kelompok sasaran layanan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama yaitu :

1. Kelompok Sasaran Internal

   Kelompok ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Sasaran layanan mencakup :

   a. Pegawai ASN (PNS dan PPPK) aktif ;
   b. Calon ASN, yaitu CPNS dan CPPPK;
   c. Pejabat Struktural dan Fungsional.

2. Kelompok Sasaran Eksternal

   Kelompok eksternal merupakan pihak yang tidak berada langsung dalam struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, namun tetap menjadi pengguna atau perima manfaat dari pelayanan BKPSDM kabupaten Probolinggo seperti :

   a. Masyarakat umum, khususnya pencari kerja yang mengikuti CASN;
   b. Instansi Vertikal dan Lembaga Pendidikan, yang menjalin kerja sama dalam pelatihan dan pengembangan SDM
   c. Pihak Ketiga/Pelaksana Kegiatan pelatihan dan Assesment.

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan jenis pelayanan sebagai berikut:

1. Layanan Pencantuman Gelar Akademik dan Sebutan Profesi;
2. Layanan Rekomendasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi;

3. Layanan Tugas Belajar;
4. Layanan Keterangan Pendidikan;
5. Layanan Ujian Dinas;
6. Layanan Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah;
7. Layanan Penerbitan Sertifikat Pengembangan Kompetensi;
8. Layanan Penghargaan Satya Lancana;
9. Layanan Izin Cuti;
10. Layanan Izin Perkawinan;
11. Layanan Izin Perceraian;
12. Layanan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian;
13. Layanan Kartu lsteri dan Kartu Suami;
14. Layanan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;
15. Layanan Kenaikan Pangkat;
16. Layanan Mutasi;
17. Layanan Penambahan Masa Kerja (PMK);
18. Layanan Usulan Pembuatan Kartu Pegawai;
19. Layanan Penetapan Surat Keputusan Jabatan Struktural;
20. Layanan Penetapan Surat Keputusan Jabatan Fungsional;
21. Layanan Pengajuan Pensiun;
22. Layanan Legalisir;
23. Layanan Pengaduan Masyarakat;
24. Layanan pengelolaan kinerja “eStamina”
25. Layanan pengelolaan talenta “Sim Tallent”
26. Layanan pengelolaan database kepegawaian “SIAP Online”
27. Layanan informasi kepegawaian (website);
28. Layanan Presensi pegawai “eStamina”
29. Layanan penilaian kompetensi;
30. Layanan front office.

Sedangkan kelompok sasaran pelayanan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Probolinggo adalah :

a. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
b. Organisasi Profesi Kepegawaian di Kabupaten Probolinggo dan
c. Masyarakat umum maupun pengguna layanan lainnya.

Untuk dapat mengoptimalkan pelayanan kepegawaian, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo didukung oleh kekuatan organisasi sebagai berikut :

1) Sumber daya manusia aparatur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo siap untuk mendukung pengelolaan program manajemen pegawai negeri sipil yang profesional dan berbasis kompetensi serta berkinerja baik;
2) Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya (Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, PT. Taspen (Persero), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) maupun instansi terkait lainnya yang memungkinkan berfungsinya seluruh elemen organisasi.

### *2.1.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Badan Kepegawaian Nasional dan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025 - 2029 dan telaah RTRW maupun KLHS maka dapat diketahui bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 - 2029 menghadapi tantangan dan peluang pelayanan antara lain :

**1. Tantangan :**

a. Keterbatasan pengadaan pegawai karena pembatasan belanja pegawai tidak dapat memenuhi kekurangan pegawai akibat tingginya gelombang pensiun ASN, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi dan redistribusi pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) berdasarkan Anjab dan ABK;

b. Percepatan pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta ASN dalam rangka mengindentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan ASN terbaik pada posisi strategis berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi;

c. Dalam rangka mengindentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan ASN terbaik pada posisi strategis, maka diperlukan percepatan pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

d. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja, sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi;

e. Optimalisasi penilaian kinerja pegawai yang menggambarkan kinerja riil individu pegawai, sehingga bisa mendukung peningkatan kinerja organisasi dan hasilnya bisa digunakan dalam pelaksanaan manajemen ASN;

f. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian berkelanjutan yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

**2. Peluang :**

a. Penerimaan PPPK Paruh Waktu menjadi salah satu opsi pemenuhan kebutuhan pegawai yang realistis;

b. Pengembangan kompetensi talenta melalui *ASN Corporate University* sebagai sarana strategis untuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi;

c. Kemudahan pemberian ijin Tugas Belajar membantu percepatan peningkatan kapasitas pegawai melalui jalur pendidikan, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan prioritas pembangunan daerah;

d. Kemudahan peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola jabatan fungsional menjadikan jabatan fungsional sebagai pilihan karir yang strategis;

e. Pemberian Umpan Balik Berkelanjutan (360 *degree feedback)* dalam penilaian kinerja pegawai dengan mengumpulkan masukan dan evaluasi dari berbagai pihak yang bekerja di sekitar pegawai, yaitu atasan, rekan kerja setingkat, bawahan, dan pihak lain yang berhubungan dengan kinerja pegawai, untuk memberikan gambaran riil dan komprehensif mengenai kinerja pegawai;

f. Pemanfaatan perkembangan teknologi digital dalam sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan digitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi ASN.

g. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Talenta (Si-MATA) BKN dalam rangka mendukung penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi.

### *2.1.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

*Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Terdapat tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*) maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan kepemerintahan yang baik (*good governance*)

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Bupati di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo selalu berkomitmen kuat untuk terus melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individu pegawai menuju perspektif manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis (*Strategic Human Resource Management*). Pengembangan sumber daya manusia ini bertujuan untuk menyediakan Aparatur Sipil Negara unggulan yang selaras dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam 8 (delapan) arahan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Astacita dan pencapaian sasaran Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi salah satu langkah yang diambil adalah dengan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Pemerintah Kabupaten

Probolinggo pada tahun 2021 telah melaksanakan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional pada Jabatan Administrasi tertentu sesuai hasil rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri RI setelah dilakukan validasi bersama dengan Kemenpan & RB RI. Proses Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional tidak hanya berhenti pada tahap pengangkatan/pelantikan saja, akan tetapi hal ini berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam manajemen ASN di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya terkait pengembangan kariernya kedepan.

Disamping itu, pelaksanaan Manajemen ASN sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 belum berjalan secara optimal, meliputi:

1. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
2. pengadaan;
3. pangkat dan Jabatan;
4. pengembangan karier;
5. pola karier;
6. promosi;
7. mutasi;
8. penilaian kinerja;
9. penggajian dan tunjangan;
10. penghargaan;
11. disiplin;
12. pemberhentian;
13. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
14. perlindungan.

Lebih dari itu, manajemen ASN selama ini belum sepenuhnya didasarkan pada Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, yang pelaksanaannya meliputi 8 (delapan) aspek yaitu:

1. perencanaan kebutuhan;
2. pengadaan;
3. pengembangan karier;
4. promosi dan mutasi;
5. manajemen kinerja;
6. penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. perlindungan dan pelayanan; dan
8. sistem informasi.

### *2.1.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Beberapa permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara hasil pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun permasalahan strategis dalam Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang teridentifikasi adalah :

**Tabel 2. 11 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia RENSTRA 2025-2029**

| No | Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1 | Belum terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan jumlah dan jenis jabatan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK) | 1. Mengapa jumlah pegawai masih kurang?<br>2. Bagaimana memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai? | 1. Adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas<br>2. kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengadaan pegawai |
| 2 | Terbatasnya integrasi dan pemanfaatan data kepegawaian dalam Sistem Informasi ASN | 1. apakah data pegawai sudah akurat dan mutakhir?<br>2. mengapa belum seluruh pelayanan terintegrasi dengan database kepegawaian?<br>3. Apakah SIAP Online sudah terintegrasi dengan SIASN? | 1. data pegawai tidak langsung dimutakhirkan pada saat ada perubahan<br>2. belum digunakannya satu aplikasi yang mengintegrasikan seluruh pelayanan dengan database |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Pengisian dan penempatan pegawai dalam jabatan melalui mutasi dan promosi belum bisa memenuh kebutuhan organisasi. | 1. Mengapa PyB belum memetakan JPT, JA, dan JF yang akan diisi sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi?<br>2. Mengapa pengembangan karier pegawai belum didasarkan pada Pola karier pegawai yang menyelaraskan antara potensi pegawai dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan? | 1. Belum disusun rencana pengembangan karier pegawai berbasis manajemen talenta<br>2. Belum disusun Pola karier pegawai yang terintegrasi secara nasional<br>3. belum disusun dan ditetapkan kelompok rencana suksesi |
| 4 | Pengembangan kompetensi belum seluruhnya berdasarkan hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan secara periodik | 1. Apakah sudah dilakukan. inventarisasi jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan dari setiap PNS?<br>2. Apakah pengembangan kompetensi pegawai sudah berdasarkan rencana pengembangan kompetensi? | Belum dilakukan identifikasi dan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja serta kebutuhan organisasi |
| 5 | Belum optimalnya penilaian kompetensi pegawai (assessment) dan pemanfaatan hasilnya | 1. Mengapa uji kompetensi belum dilaksanakan kepada seluruh pegawai sebagai dasar penyusunan profil kompetensi pegawai?<br>2. Apa upaya untuk dapat menilai kompetensi seluruh pegawai melalui *assessment center*? | 1. Kesempatan untuk mengikuti penilaian kompetensi melalui *assessment center* sangat terbatas<br>2. Belum tersedia Infrastruktur *assessment center* secara lengkap |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 1. Masih rendahnya kualitas penilaian kinerja yang berdampak pada ketidaksesuaian antara capaian dan target<br>2. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil penilaian kinerja ASN untuk dasar manajemen ASN | **1.** Apakah seluruh PD sudah melaporkan penilaian kinerja pegawai?<br>**2.** Apakah profil kinerja pegawai sudah disusun berdasarkan Pemeringkatan Kinerja Tahunan?<br>**3.** Apakah hasil penilaian kinerja pegawai sudah dijadikan dasar pertimbangan penentuan prioritas pengembangan kompetensi dan pengembangan karier pegawai serta pemberian reward dan punishment lainnya? | 1. Pengelolaan penilaian kinerja pegawai belum optimal<br>2. Penentuan Rencana Hasil Kerja dan target kinerja belum dilakukan melalui dialog kinerja |

### *2.1.8 Isu – Isu Strategis*

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo dilakukan dengan menganalisa berbagai faktor dalam SWOT, baik faktor internal yang meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*)

serta faktor eksternal yang meliputi peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*). Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka dapat disusun penentuan isu – isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan- permasalahan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka dapat disusun penentuan isu – isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo, sebagai berikut

Tabel 2. 12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Pengadaan ASN | Belum terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan jumlah dan jenis jabatan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK) | | tuntutan digitalisasi SDM, kompetensi ASN di era transformasi digital. | implementasi UU ASN, Sistem Merit, SPBE, dan reformasi birokrasi. | kondisi distribusi ASN di Jawa Timur, kebutuhan SDM berbasis potensi daerah. | Pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan prioritas organisasi dan pembangunan daerah |
| 2 Pengembangan Karir ASN | Pengembangan kompetensi belum seluruhnya berdasarkan hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan secara periodik | | | | | Kesenjangan Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan |
| | Belum optimalnya penilaian kompetensi pegawai (assessment) dan pemanfaatan hasilnya | | | | | Hasil assessment dasar pengelolaan manajemen talenta. |
| 3 Pengelolaa Mutas dan Promosi ASN | Pengisian dan penempatan pegawai dalam jabatan melalui mutasi dan promosi belum bisa memenuh kebutuhan organisasi. | | | | | Mutasi dan promosi pegawai berbasis Manajemen Talenta |
| 4 Manajemen Kinerja ASN | 1. Masih rendahnya kualitas penilaian kinerja yang berdampak pada ketidaksesuaian antara capaian dan target | | | | | 1. Penguatan sistem manajemen kinerja ASN yang akuntabel |
| | 2. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil penilaian kinerja ASN untuk dasar manajemen ASN | | | | | 2. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja ASN untuk dasar manajemen ASN. |
| 5 Sistem Informasi Kepegawaian | Terbatasnya integrasi dan pemanfaatan data kepegawaian dalam Sistem Informasi ASN | | | | | Penguatan sistem informasi manajemen ASN yang terintegrasi |

Berdasarkan hasil identifikasi potensi kewenangan, permasalahan aktual, serta mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis baik pada tataran global, nasional, maupun regional, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan dan program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo. Berikut rumusan Isu Strategis Daerah – BKPSDM Kabupaten Probolinggo :

1. **Pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan prioritas organisasi dan pembangunan daerah**

   Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), sehingga diperlukan strategi pengadaan ASN yang sesuai prioritas organisasi dan kebutuhan riil perangkat daerah.

2. **Kesenjangan Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan**

   Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN karena tidak seluruhnya berbasis analisis kebutuhan pelatihan dan belum meratanya pelaksanaan penilaian kompetensi melalui Assessment Center, sehingga diperlukan kebijakan peningkatan hak dan kesempatan pengembangan kompetensi yang terarah dan berkelanjutan.

3. **Mutasi dan promosi pegawai berbasis Manajemen Talenta**

   Proses mutasi dan promosi belum sepenuhnya berbasis manajemen talenta dan rencana suksesi, sehingga diperlukan penerapan sistem mutasi dan promosi yang objektif, transparan, serta sesuai kebutuhan organisasi.

4. **Penguatan sistem manajemen kinerja ASN yang akuntabel**

   Penguatan Sistem Manajemen Kinerja ASN yang Akuntabel dilakukan untuk memastikan setiap aparatur memiliki target kinerja yang terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan organisasi serta pembangunan daerah. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penilaian, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait promosi, mutasi, penghargaan, dan pengembangan kompetensi ASN.

   Melalui penerapan sistem merit, digitalisasi e-kinerja, serta pengawasan yang obyektif, diharapkan tercipta budaya kerja ASN yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, manajemen

kinerja ASN dapat lebih akuntabel, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

5. **Pemanfaatan hasil penilaian kinerja ASN untuk dasar manajemen ASN.**

   Pemanfaatan hasil penilaian kinerja ASN merupakan langkah strategis untuk menjadikan kinerja sebagai dasar utama dalam manajemen ASN. Hasil penilaian kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait promosi, mutasi, rotasi, penghargaan, pemberian tunjangan kinerja, serta pengembangan kompetensi pegawai.

   Dengan pemanfaatan yang optimal, penilaian kinerja ASN akan mendorong terciptanya sistem merit yang adil, meningkatkan motivasi kerja, memperkuat profesionalisme aparatur, dan memastikan setiap pegawai berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi dan pelayanan publik yang berkualitas.

6. **Penguatan sistem informasi manajemen ASN yang terintegrasi**

   Belum terintegrasinya Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP Online) dengan aplikasi pelayanan kepegawaian lainnya, sehingga diperlukan pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis Big Data yang terintegrasi, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan strategis.

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo.

Adapun tujuan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo mengacu pada tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 yaitu: **“Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional”**.

Tujuan perencanaan strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia periode 2025-2029 adalah: **“Terwujudnya manajemen ASN Profesional Berdasarkan Prinsip Meritokrasi”** dengan indikator **“Indeks Sistem Merit”.**

### 3.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 yaitu : **"Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN**" dengan indikator **Indeks-Sistem Merit.**

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 yaitu : "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN" dengan indikator Indeks Sistem Merit, serta dalam rangka menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi dan sesuai tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Probolinggo maka dalam Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja sasaran yang menjadi urusan/kewenangan BKPSDM Kabupaten Probolinggo yaitu :

**Sasaran 1** : "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Sistem Merit" dengan indikator sasaran :

1. Nilai Sistem Merit pada layanan Kepegawaian Daerah.
2. Nilai Sistem Merit pada Layanan Pengembangan SDM.

**Sasaran 2** : "Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah" dengan indikator sasaran : "Prosentase Kenaikan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah".

Sistem Merit penerapannya telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan diterapkannya Sistem Merit adalah untuk memastikan jabatan pegawai yang ada di birokrasi

pemerintah yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Dengan kata lain, Sistem Merit bertujuan untuk membangun bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan mewujudkan pegawai ASN yang professional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi. Indeks Sistem Merit diukur dengan menggunakan 8 (delapan) dimensi sebagaimana diatur dalam peraturan PermenPAN RB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang menetapkan Indeks Sistem Merit untuk mengukur penerapan sistem ini di instansi pemerintah. Penilaian dilakukan melalui empat tahap, yaitu advokasi, pengukuran, verifikasi, dan pengawasan, serta menggunakan aplikasi penilaian mandiri (SIPINTER) untuk mengukur sejauh mana instansi menerapkan sistem merit berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan objektif., antara lain:

1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karir;
4. Promosi dan mutasi;
5. Manajemen kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan pelayanan;
8. Sistem informasi.

Adapun indikator dari setiap dimensi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan, dengan sub aspek :
   a) Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai uuntuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK.
   b) Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan real time yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi.
   c) Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja.
   d) Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun yang berasal dari CALON PNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain
2. Pengadaan dengan sub aspek :

a) Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan yang dirinci menurut jumlah, jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja, baik dari CPNS, PPPK, ataupun PNS dari instansi lain (untuk instansi tertentu).
b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub/Perbup/Perwal) terkait pengadaan ASN dan TNI/POLRI (untuk instansi tertentu) secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif.
c) Pelaksanaan penerimaan CALON PNS/PPPk/PNS dari instansi lain dilakukan secara terbuka.
d) Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi CALON PNS.
e) Persentase pegawai yang baru diangkat menjadi PNS yang penempatan pertamanya sesuai jabtan yang dilamar

3. Pengembangan Karir dengan sub aspek :
a) Ketersediaan standar kompetensi manajerial, teknis dan social kultural untuk setiap jabatan.
b) Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi.
c) Ketersediaan Talent Pool dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi.
d) Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karis instansi.
e) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai.
f) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja.
g) Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas.
h) Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan.
i) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai.
j) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring

4. Promosi dan Mutasi dengan sub aspek :

a) Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen / Pergub / Perbup / Perwal) tentang pola karir.
b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen / Pergub / Perbup / Perwal) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutase dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi.
c) Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.

5. Manajemen Kinerja dengan sub aspek :
a) Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi.
b) Penggunaan metode penilaian kinerja yang objektif.
c) Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kerja.
d) Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi.
e) Ketersediaan kebijakan internal yang mengatur hubungan antara hasil penilaian kinerja dengan memberi prioritas terhadap pegawai yang berkinerja tinggi dalam pembinaan dan pengembangan karir.

6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dengan sub aspek :
a) Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja.
b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen / Pergub / Perbup / Perwal) untuk memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi luar biasa.
c) Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya.
d) Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode prilaku yang dilakukan pegawai.

7. Perlindungan dan Pelayanan dengan sub aspek :
a) Kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional.
b) Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhakan pelayanan administrasi.

8. Sistem Informasi dengan sub aspek :
    a) Pembangunan Sistem Informasi Kepegawian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai.
    b) Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online.
    c) Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian.
    d) Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.

Adapun tata cara penilaian yang digunakan untuk penilaian indeks sistem merit adalah sebagai berikut :

1. Penilaian dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh PPK yang diketuai oleh PyB dan beranggotakan pejabat yang terkait di bidang kepegawaian di masingmasing Instansi.
2. Penilaian dilaksanakan berdasarkan aspek dan sub-aspek yang telah ditetapkan KASN.
3. Penyampaian hasil penilaian oleh Instansi kepada KASN disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan.
4. Verifikasi atas hasil penilaian yang disampaikan Instansi oleh tim yang dibentuk Ketua KASN.
5. Penetapan tingkat penerapan sistem merit dan penerbitan rekomendasi oleh pimpinan KASN.
6. Tindak lanjut rekomendasi oleh Instansi.
7. Monitoring dan bimbingan dari Tim KASN, Kemenpan, BKN dan LAN.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka metode penilaian indikator yang digunakan untuk mengukur indeks sistem merit adalah sebagai berikut :

1. Penilaian menggunakan sistem skor dan bobot;
2. Masing-masing aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek;
3. Masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarannya ditentukan berdasarkan peranannya dalam sistem merit;
4. Masing-masing sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan :
    a) Kurang dengan skor 1; jika sebagian besar elemen yg dinilai belum sesuai ketentuan

b) Cukup dengan skor 2; jika baru sebagian elemen yg dinilai sudah sesuai ketentuan
c) Baik dengan skor 3; jika sebagian besar elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan
d) Sangat baik dengan skor 4, jika semua elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan , walau ada kekurangan namun dampaknya tidak luas.

5. Hasil penilaian menentukan tingkat penerapan sistem merit di Instansi yang dinilai serta rekomendasi dalam rangka perbaikan serta rekomendasi KASN.
6. Rumus Perhitungan Indeks Sistem Merit yaitu Jumlah Skor Penilaian Atas Aspek Indikator Sistem Merit.

Ada 4 (empat) kategori indeks penerapan sistem merit ASN yaitu :

1. Kategori I dengan Predikat Buruk dilakukan audit dan supervisi sampai dengan kategori baik.
2. Kategori II dengan Predikat Kurang dibimbing sampai dengan kategori baik.
3. Kategori III dengan Predikat Baik diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan dari KASN dan dievaluasi setiap tahun.
4. Kategori IV dengan predikat Sangat Baik dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool dan dievaluasi 2 tahun sekali.

Selanjutnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. SAKIP menjadi alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi SAKIP dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yakni serangkaian kegiatan dengan membandingkan antara hasil kinerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan rencana,

standar, dan norma yang berlaku. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi:

1. perencanaan kinerj;
2. pengukuran kinerja;
3. laporan kinerja;
4. evaluasi internal dan capaian kinerja.

   Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

Berikutnya komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

1. Evaluasi AKIP meliputi empat komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2. Masing-masing Komponen tersebut terdiri dari Subkomponen Keberadaan, Subkomponen Kualitas, dan Subkomponen Pemanfaatan.
3. Kriteria merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

   LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

**Gambar 3. 1 Lembar Kerja Evaluasi**

| Komponen | Sub-Komponen 1 Keberadaan | Sub-Komponen 2 Kualitas | Sub-Komponen 3 Pemanfaatan | Total Bobot |
|---|---|---|---|---|
| | 20% | 30% | 50% | |
| Perencanaan Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 |
| Pengukuran Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 |
| Pelaporan Kinerja | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 5 | 7,5 | 12,5 | 25 |
| **Nilai Akuntabilitas Kinerja** | 20 | 30 | 50 | 100 |

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan di-pergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Perangkat Daerah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

**Gambar 3. 2 Nilai Hasil Akhir**

| NO | KATAGORI | NILAI ANGKA | INTERPRETASI |
|---|---|---|---|
| 1 | AA | >90 – 100 | **Sangat Memuaskan,** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. |
| 2 | A | >80 – 90 | **Memuaskan,** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator. |
| 3 | BB | >70 – 80 | **Sangat Baik,** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. |
| 4 | B | >60 – 70 | **Baik,** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. |
| 5 | CC | >50 – 60 | **Cukup (Memadai),** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. |
| 6 | C | >30 – 50 | **Kurang,** Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajmen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. |
| 7 | D | 0 - 30 | **Sangat Kurang,** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP |

Prinsip-prinsip dokumen SAKIP meliputi :

1. ***Rencana Strategis***

   Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

2. ***Indikator Kinerja Utama***

   Indikator Kinerja Utama (lKU) merupakan indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra.

3. ***Rencana Kinerja Tahunan***

   Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra.

4. ***Penetapan Kinerja***

   Penetapan Kinerja (PK) merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kined alperjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh setiap unit kerja.

5. ***Rencana Aksi***

   Rencana Aksi merupakan rencana kegiatan yang disusun secara terjadwal dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

6. ***Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)***

   Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

Di dalam mencapai tujuan PD yang telah tertuang di RPJMD dimana akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun kedepan maka perlu adanya penyusunan Konsep Renstra tahun 2025 - 2029 yang selaras, dengan demikian kita dapat melihat gambar di bawah sesuai Konsep Renstra:

**Gambar 3. 3 Konsep Renstra**

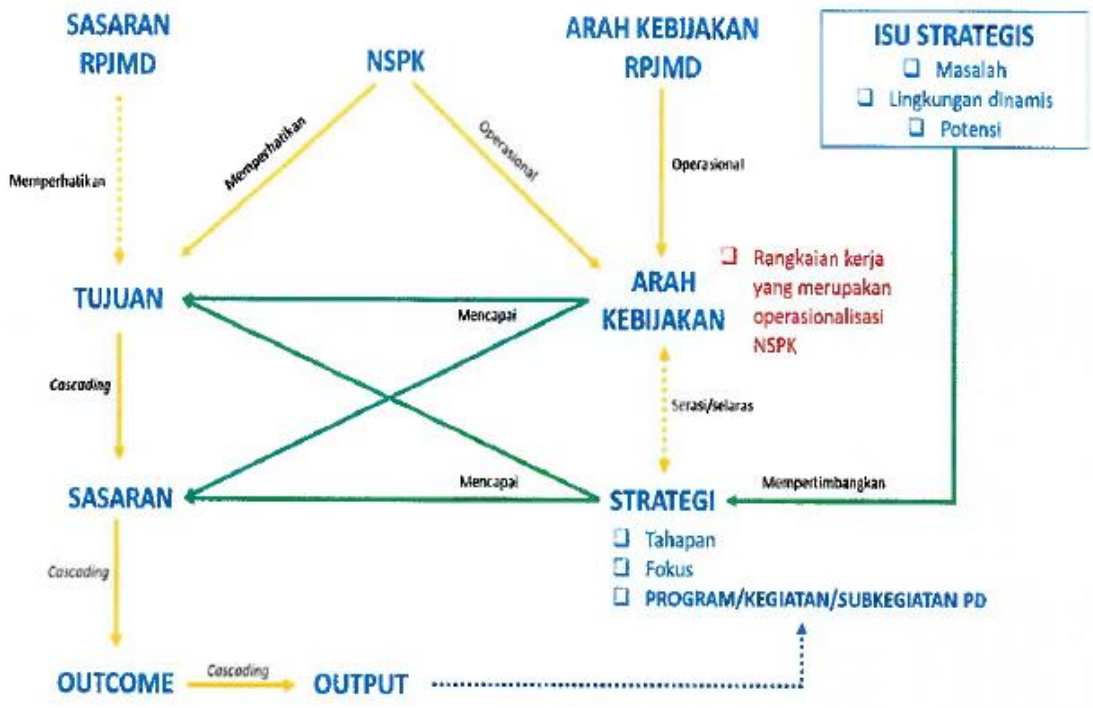


**Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra**

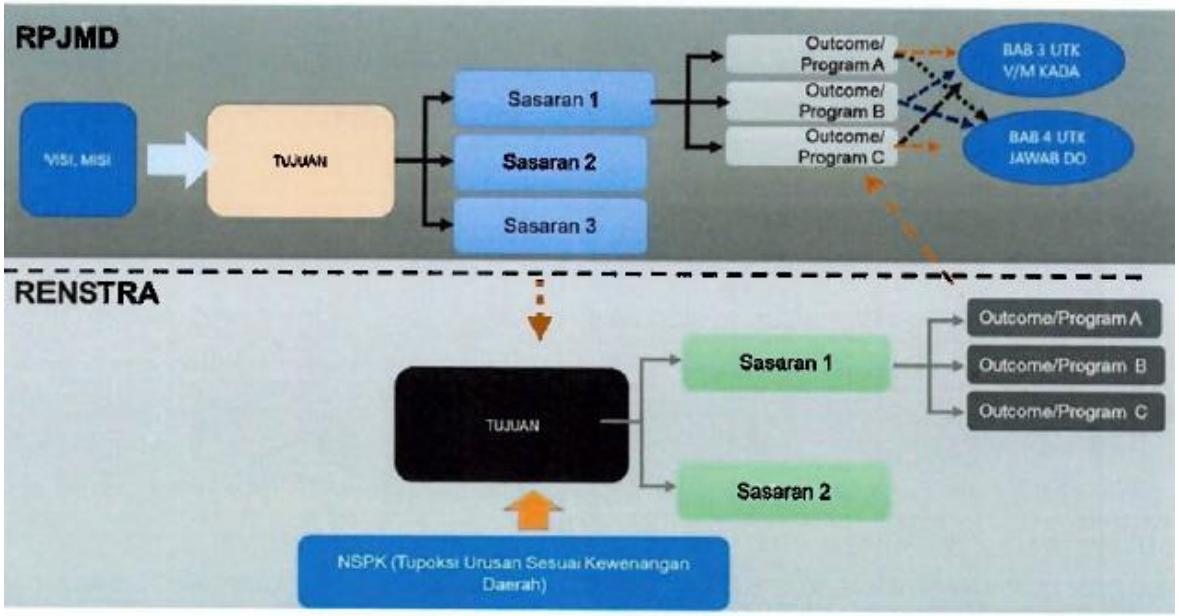


Dari gambar di atas bahwa tujuan perangkat daerah yang tertuang dicascading renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran dari sasaran RPJMND, sehingga bisa menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah, adapun tabel di bawah ini adalah keterkaitan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan Sasaran RPJMD Tahun 2025 2029.

## Tabel 3. 1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

### RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
### PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| | | | | | TARGET TAHUN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** | | | | | | | | | | | |
| - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN<br>- Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah | Terwujudnya manajemen ASN Profesional Berdasarkan Prinsip Meritokrasi | | Indeks Sistem Merit (Indeks) | 0,79 | 0,8 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Sistem Merit | Nilai Sistem Merit pada Layanan Kepegawaian (Nilai) | 243 | 246 | 253 | 253 | 256 | 258 | 263 | |
| | | | Nilai Sistem Merit pada Layanan Pengembangan SDM (Nilai) | 80 | 80 | 82,5 | 82,5 | 87,5 | 95 | 95 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

Berdasarakan Tabel 3.3 bisa kita lihat, tujuan dari Rencana Strategis ialah Terwujudnya manajemen ASN Profesional Berdasarkan Prinsip Meritokrasi dengan indikator Indeks Sistem Merit. Sedangkan sasarannya ada 2 (dua) :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Sistem Merit, dengan indikator :
   a. Nilai Sistem Merit pada Layanan Kepegawaian
   b. Nilai Sistem Merit pada Layanan Pengembangan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah, dengan indikator Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat

   Definisi Operasional dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah sebagai berikut :

   a. Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi, yakni prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.
   b. Indeks Sistem Merit merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai penerapan prinsip-prinsip Sistem Merit dalam manajemen ASN di Instansi Pemerintah dengan membandingkan antara realisasi nilai Sistem Merit dengan total skor Sistem Merit.
   c. Nilai Sistem Merit merupakan hasil evaluasi dari penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN yang meliputi 8 Aspek Sistem Merit Yaitu :
      1) Perencanaan Kebutuhan
      2) Pengadaan
      3) Pengembangan Karir
      4) Promosi dan Mutasi
      5) Manajemen Kinerja
      6) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
      7) Perlindungan dan Pelayanan
      8) Sistem Informasi
   d. Nilai Sistem Merit pada Layanan Kepegawaian adalah jumlah nilai dari 7 (tujuh) Aspek Sistem Merit pada Layanan Kepegawaian, yaitu :
      a. Perencanaan Kebutuhan
      b. Pengadaan

c. Promosi dan Mutasi
d. Manajemen Kinerja
e. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
f. Perlindungan dan Pelayanan
g. Sistem Informasi

e. Nilai Sistem Merit pada Layanan Pengembangan SDM adalah jumlah nilai dari 1 (satu) Aspek Sistem Merit pada Layanan Pengembangan SDM yaitu Aspek Pengembangan Karir
f. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
g. Prosentase Nilai AKIP adalah prosentase kenaikan Kinerja Instansi Pemerintah dengan menghitung realisasi nilai AKIP tahun sekarang dikurangi realisasi nilai AKIP tahun kemarin dibagi realisasi nilai AKIP tahun kemarin kali seratus.

Penahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Probolinggo 2025–2029

**Tujuan**

"Terwujudnya Manajemen ASN Profesional Berdasarkan Prinsip Meritokrasi"

**Sasaran**

"Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan berbasis sistem merit"

**Prioritas Pembangunan**

- ASN Award
- Guru Nyaman Bekerja (Rekrutmen 1.000 tenaga pendidik baru)
- Rekrutmen 500 tenaga kesehatan
- Kartu Law Care

**Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD**

| Tahun | Fokus Strategis | Program/Kegiatan Utama | Output/Indikator |
|---|---|---|---|
| **2025** | **Perencanaan & Fondasi Prioritas** | - Penyusunan roadmap prioritas pembangunan SDM ASN 2025–2029<br>- Persiapan ASN Award (perumusan indikator & mekanisme penilaian).<br>- Perencanaan formasi rekrutmen 1.000 tenaga pendidik & 500 tenaga kesehatan.<br>- Perencanaan sistem layanan hukum ASN berbasis “Kartu Law Care” | - Dokumen roadmap prioritas SDM ASN.<br>- Mekanisme & indikator ASN Award.<br>- Dokumen formasi kebutuhan tenaga pendidik & kesehatan.<br>- Draft sistem layanan Kartu Law Care. |
| **2026** | **Implementasi Awal Prioritas** | - Pelaksanaan ASN Award pertama di Kabupaten Probolinggo.<br>- Rekrutmen tahap I tenaga pendidik (±400 orang).<br>- Rekrutmen tahap I tenaga kesehatan (±200 orang).<br>- Uji coba layanan hukum ASN melalui Kartu Law Care. | - ASN Award terlaksana dengan partisipasi ASN lintas OPD.<br>- 400 guru baru hasil rekrutmen.<br>- 200 tenaga kesehatan baru hasil rekrutmen.<br>- ASN memperoleh akses awal layanan Kartu Law Care. |
| **2027** | **Penguatan Implementasi & Kapasitas** | - Penguatan mekanisme ASN Award dengan kategori inovasi & pelayanan publik.<br>- Rekrutmen tahap II tenaga pendidik (±300 orang).<br>- Rekrutmen tahap II tenaga kesehatan (±150 | - ASN Award kategori inovasi & pelayanan publik.<br>- Tambahan 300 guru baru.<br>- Tambahan 150 tenaga kesehatan |

| Tahun | Fokus Strategis | Program/Kegiatan Utama | Output/Indikator |
|---|---|---|---|
| | | orang).<br>- Optimalisasi layanan hukum ASN (Kartu Law Care terintegrasi dengan BKPSDM dan OPD terkait). | baru.<br>- ASN menggunakan Kartu Law Care secara reguler. |
| **2028** | **Evaluasi & Integrasi Sistem Merit** | - Evaluasi keberlanjutan ASN Award (dijadikan agenda tahunan daerah)<br>- Rekrutmen tahap III tenaga pendidik (±300 orang) sehingga total 1.000 tercapai<br>- Rekrutmen tahap III tenaga kesehatan (±150 orang) sehingga total 500 tercapai<br>- Integrasi Kartu Law Care dengan sistem kepegawaian digital BKPSDM | - ASN Award menjadi agenda tahunan resmi daerah.<br>- Total 1.000 guru baru telah direkrut<br>- Total 500 tenaga kesehatan baru telah direkrut<br>- Kartu Law Care terintegrasi penuh dengan sistem digital ASN |
| **2029** | **Konsolidasi & Keberlanjutan** | - ASN Award dikembangkan menjadi ajang meritokrasi ASN (berbasis kinerja & kompetensi)<br>- Monitoring dan evaluasi kinerja tenaga pendidik & kesehatan baru<br>- Kartu Law Care dikembangkan sebagai layanan hukum ASN berbasis digital permanen | - ASN Award berfungsi sebagai instrumen implementasi sistem merit<br>- Laporan evaluasi kinerja guru & tenaga kesehatan baru<br>- Kartu Law Care digital berjalan berkelanjutan |

## 3.3 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Rencata Strategi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 disusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**A. STRATEGI**

1. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan ASN.
2. Penataan ulang (Redistribusi) pegawai melalui mekanisme mutasi/promosi berdasarkan kebutuhan organisasi.
3. Pemutakhiran data base kepegawaian melalui SIAP Online secara berkala.
4. Pelaksanaan mutasi dan promosi yang didasarkan pada hasil manajemen talenta dan peraturan pola karier.
5. Pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi.
6. Optimalisasi penilaian kompetensi pegawai melalui *Assessment Center.*
7. Penerapan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian.
8. Digitalisasi pelayanan kepegawaian.
9. Optimalisasi penerapan *Sistem Merit* dalam manajeman ASN.

**B. KEBIJAKAN**

7. Penyusunan kebutuhan pegawai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan Anjab dan ABK.
8. Pengisian dan penempatan pegawai dalam jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja.
9. Pembangunan dan pengembangan aplikasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dengan SIAP Oline.
10. Pengelolaan kelompok rencana suksesi yang dihasilkan dari manajemen talenta.
11. Penyusunan pola karier sebagai pola dasar mengenai urutan penempatan dan/ atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan.

12. Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
13. Percepatan pembangunan dan pemanfaatan Assessment Center untuk penilaian pegawai.
14. Pelaksanaan penilaian dan dialog kinerja secara berkala 3 bulanan.
15. Optimalisasi aplikasi presensi mobile dan penilaian kinerja pegawai (E-Stamina).
16. Pengembangan infra struktur pelayanan less paper berbasis digital.
17. Pemantapan penerapan seluruh aspek Sistem Merit dalam manajemen ASN.

Dari uraian di atas maka dapat dilihat hubungan antara Tujuan dan Sasaran sampai dengan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Sistem Merit, dengan indikator :
   a. Nilai Sistem Merit pada Layanan Kepegawaian
   b. Nilai Sistem Merit pada Layanan Pengembangan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah, dengan indikator Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat

## Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Elemen NSPK : | | | |
| | 1. pengembangan karier ASN; | Peningkatan kualitas aparatur organisasi pemerintah daerah berbasis kompetensi dan prestasi, serta pengukuran kinerja dan loyalitas. | Pengajuan usulan dan pelaksanaan pengadaan pegawai berdasarkan prioritas organisasi dan pembangunan daerah<br>Perencanaan dan implementasi pengembangan kompetensi yang adaptif dan berkelanjutan<br>Penilaian kompetensi pegawai melalui Assessment Center<br>Pembinaan kinerja melalui dialog kinerja dan pelaksanaan penilaian berbasis hasil<br>Penguatan Sistem Monitoring & Evaluasi melalui dashboard kinerja | |
| | 2. penggajian, tunjangan, dan fasilitas; | | | |
| | 3. penghargaan; | | | |
| | 4. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; | | | |
| | 5. perlindungan; | | | |
| | 6. penilaian kinerja; | | | |
| | 7. cuti; | | | |
| | 8. kode etik; | | | |
| | 9. disiplin; | | | |
| | 10. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; | Memastikan implementasi sistem meritokrasi secara menyeluruh melalui pengembangan kompetensi pegawai agar memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, memastikan kualifikasi dan tingkat pendidikan pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan, dan penempatan pegawai melalui mutasi dan /atau promosi didasarkan pada perencanaan yang matang. | Pengembangan infrastruktur sistem informasi kepegawaian yang terstandar nasional | |
| | 11. Pengadaan ASN | | Mutasi dan promosi pegawai didasarkan pada hasil manajemen talenta dan pola karier<br>Pengajuan usulan dan pelaksanaan pengadaan pegawai berdasarkan prioritas organisasi dan pembangunan daerah | |
| | 12. Pengangkatan ASN | | | |
| | 13. pangkat; | | | |
| | 14. mutasi; | | | |
| | 15. jabatan; | | | |
| | 16. pola karier; | | | |
| | 17. pemberhentian; | | | |
| | 18. pensiun. | | | |

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, maka untuk mencapai sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo ditentukanlah program dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki BKPSDM Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Program Kepegawaian Daerah Program Kepegawaian Daerah mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) di tingkat daerah, seperti pengadaan, pembinaan pemberhentian, mutasi promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan, diklat, pendidikan, sertifikasi, pembinaan karier, serta pembelajaran berkelanjutan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing ASN.

Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**4.2 Uraian Kegiatan**

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
10. Mutasi dan Promosi ASN;
11. Pengembangan Kompetensi ASN;
12. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
13. Pengembangan Kompetensi ASN;
14. Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksa-

naan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dan tabel dibawah ini:

**Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra PD**

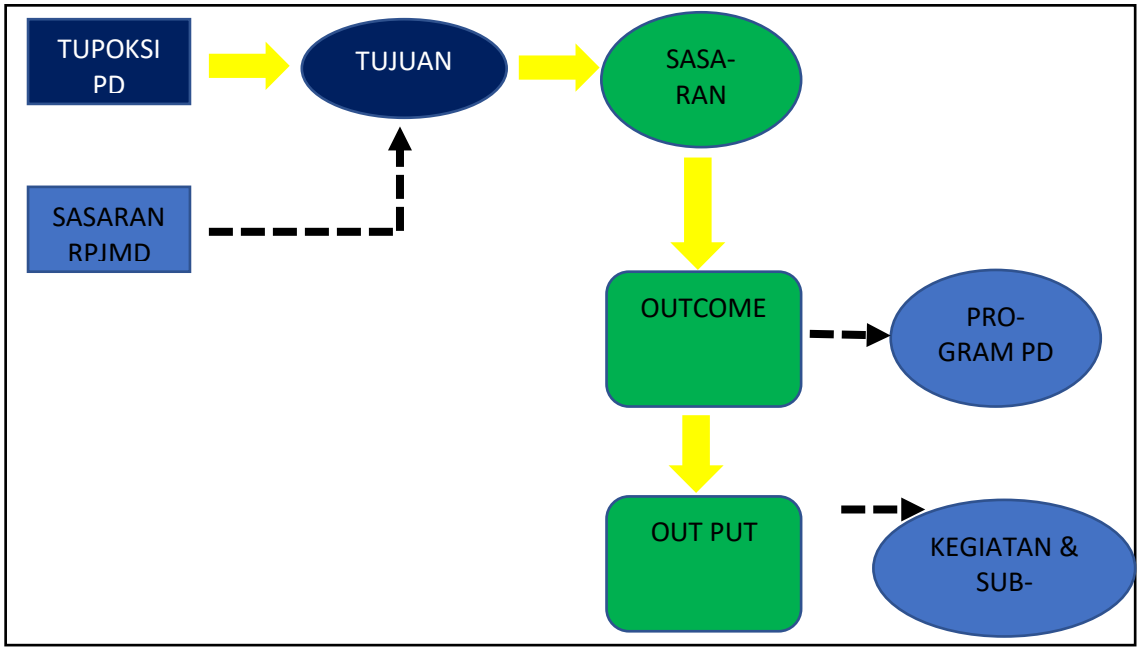


*Sumber : INMEN No 2 Tahun 2025*

**Tabel 4. 1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA BKPSDM**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** | | | | | | | |
| - Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah<br>- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN | Terwujudnya manajemen ASN Profesional Berdasarkan Prinsip Meritokrasi | | | | Indeks Sistem Merit (Indeks) | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepega-waian, Pen-didikan dan Pelatihan Berbasis Sistem Merit | | | Nilai Sistem Merit pada Layanan Kepeg-awaian (Nilai) | | |
| | | | | | Nilai Sistem Merit pada Layanan Pengembangan SDM (Nilai) | | |
| | | | Mening-katnya kapa-bilitas pega-wai yang meliputi kemampuan teknis, manejerial dan sosio kultural | | Nilai Sistem Merit Pada Aspek Pengem-bangan Karir (Nilai) | 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | | | Nilai 1 (Satu) Sub Aspek pada Aspek Pengem-bangan Karir | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang) | 5.04.02.2.01 - Pengem-bangan Kompetensi Teknis | |
| | | | | | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang) | 5.04.02.2.01.0003 - Penye-lenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | |
| | | | | Nilai 1 (satu) sub Aspek pada Aspek Pengadaan | Jumlah Laporan Hasil Penye-lenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Dae-rah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan) | 5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengem-bangan Kompetensi Mana-jerial dan Fungsional | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penye-lenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Dae-rah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan) | 5.04.02.2.02.0007 - Penye-lenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajab-atan | |
| | | | | Nilai kom-posit dari 3 (Tiga) Sub Aspek pada Aspek Pengem-bangan Karir | Jumlah Doku-men Hasil Pem-binaan, Koordi-nasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen) | 5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengem-bangan Kompetensi Mana-jerial dan Fungsional | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen) | 5.04.02.2.02.0008 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | |
| | | | Tersedianya rencana kebutuhan ASN | | Nilai Sistem Merit Pada Aspek Perencanaan Kebutuhan (Nilai) | 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| | | | | Nilai komposit dari 4 (Empat) Sub Aspek pada Aspek Perencanaan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen ) | 5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen ) | 5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan ASN | | Nilai Sistem Merit Pada Aspek Pengadaan (Nilai) | 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| | | | | Nilai komposit dari 4 (Empat) Sub Aspek pada Aspek Pengadaan | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen ) | 5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen ) | 5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | |
| | | | Terlaksanannya pelayanan sesuai dengan stardat pelayanan (SP) dan Stadart Operasional Prosedur (SOP) | | Nilai Sistem Merit pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan (Nilai) | 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| | | | | Nilai 1 (satu) Sub Aspek pada Aspek Pelayanan | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen ) | 5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga) | 5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksa- | 5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | naan Administrasi Pemberhentian (Dokumen ) | Pemberhentian | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga) | 5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | |
| | | | Tersedianya data kepegawaian yang valid, akurat, dan mutakhir | | Nilai Sistem Merit pada Aspek Sistem Informasi (Nilai) | 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| | | | | Nilai komposit dari 3 (Tiga) Sub Aspek pada Aspek Sistem Informasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen ) | 5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen ) | 5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen ) | 5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen ) | 5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian | |
| | | | Terlaksananya penataan dan pengisian jabatan sesuai dengan standart kompetensi jabatan (SKJ) yang di tetapkan | | Nilai Sistem Merit Pada Aspek Promosi dan Mutasi (Nilai) | 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| | | | | Nilai komposit dari 3 (tiga) Sub Aspek pada Aspek Promosi dan Mutasi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen ) | 5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen ) | 5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN | |
| | | | | Nilai komposit dari 4 (Empat) Sub Aspek pada Aspek Pengembangan Karir | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen ) | 5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN | |
| | | | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen ) | 5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN | |
| | | | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen ) | 5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (Dokumen ) | | |
| | | | | Nilai 1 (Satu) Sub Aspek Pada Aspek Pengembangan Karir | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen ) | 5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen ) | 5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center | |
| | | | | Jumlah Nilai 1 (Satu) Sub Aspek Pada Aspek Informasi | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang) | 5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN | |
| | | | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang) | 5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | |
| | | | Tersedianya data capaian kinerja ASN | | Nilai Sistem Merit pada Aspek Manajemen Kinerja (Nilai) | 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| | | | | Nilai kmposit dari 5 (lima) Sub Aspek pada Aspek Manajemen Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan) | 5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen ) | 5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen ) | 5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen ) | 5.03.02.2.04.0001 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen ) | 5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan) | 5.03.02.2.04.0003 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |
| | | | | Nilai komposit dari 4 (empat) Sub Aspek pada Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang) | 5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |
| | | | | | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang) | 5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | |
| | | | Meningkatnya Produktivitas ASN | | Nilai Sistem Merit pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan | 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disiplin (Nilai) | | |
| | | | | Nilai 1 (Satu) Sub Aspek pada Aspek Pengembangaan Karir | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang) | 5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |
| | | | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang) | 5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN | |
| | | | | Nilai 1 (satu) Sub Aspek pada Aspek Perlindungan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan) | 5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan) | 5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan-an/Triwulanan/S | 5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | emesteran SKPD (Laporan) | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Terkelola | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | Prosentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | Persentase Administrasi Umum Pada Perangkat Daerah Terlaksana | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 5.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |
| | | | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 5.03.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliha-ra/Direhabilitasi (Unit) | 5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 5.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliha-ra/Direhabilitasi (Unit) | 5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |

### 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

# Tabel 4. 2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| | | | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TAR-GET | PAGU | TAR-GET | PAGU | TAR-GET | PAGU | TAR-GET | PAGU | TAR-GET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN | | | | 9.476.871.155,94 | | 9.582.300.000,00 | | 9.725.200.000,00 | | 9.923.700.000,00 | | 10.156.400.000,00 | | |
| 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 8.639.048.855,94 | | 8.735.100.000,00 | | 8.865.300.000,00 | | 9.046.200.000,00 | | 9.258.300.000,00 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD | 81.0 | 81.54 | 8.639.048.855,94 | 81.58 | 8.735.100.000,00 | 81.62 | 8.865.300.000,00 | 81.66 | 9.046.200.000,00 | 81.70 | 9.258.300.000,00 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 5.03.01.2.01 - Perencanaan, Pengang-garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12.792.000,00 | | 12.792.000,00 | | 12.800.000,00 | | 13.800.000,00 | | 13.800.000,00 | | |
| Jumlah dokumen Perencanaan, Pengang-garan dan Evaluasi Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real-isasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 | 5 | 12.792.000,00 | 5 | 12.792.000,00 | 5 | 12.800.000,00 | 5 | 13.800.000,00 | 5 | 13.800.000,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7.800.000,00 | | 7.800.000,00 | | 7.800.000,00 | | 7.800.000,00 | | 7.800.000,00 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 | 12 | 7.800.000,00 | 12 | 7.800.000,00 | 12 | 7.800.000,00 | 12 | 7.800.000,00 | 12 | 7.800.000,00 | | |
| 5.03.01.2.01.0006 - Koordi-nasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4.992.000,00 | | 4.992.000,00 | | 5.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real-isasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 | 5 | 4.992.000,00 | 5 | 4.992.000,00 | 5 | 5.000.000,00 | 5 | 6.000.000,00 | 5 | 6.000.000,00 | | |
| 5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 7.490.185.379,94 | | 7.573.240.802,00 | | 7.692.824.740,00 | | 7.852.248.966,00 | | 8.035.651.832,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 648 | 648 | 7.490.185.379,94 | 648 | 7.573.240.802,00 | 648 | 7.692.824.740,00 | 648 | 7.852.248.966,00 | 648 | 8.035.651.832,00 | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan-an/Triwulanan/Semesteran SKPD | 17 | 17 | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 | | |
| 5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 7.470.185.379,94 | | 7.553.240.802,00 | | 7.665.824.740,00 | | 7.822.248.966,00 | | 8.005.651.832,00 | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 648 | 648 | 7.470.185.379,94 | 648 | 7.553.240.802,00 | 648 | 7.665.824.740,00 | 648 | 7.822.248.966,00 | 648 | 8.005.651.832,00 | |
| 5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 27.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulan-an/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan-an/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan-an/Triwulanan/Semesteran SKPD | 17 | 17 | 20.000.000,00 | 17 | 20.000.000,00 | 17 | 27.000.000,00 | 17 | 30.000.000,00 | 17 | 30.000.000,00 | |
| 5.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | |
| Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Terkelola | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | 2 | 4.160.000,00 | 2 | 4.160.000,00 | 2 | 4.160.000,00 | 2 | 4.160.000,00 | 2 | 4.160.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | |
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | 2 | 4.160.000,00 | 2 | 4.160.000,00 | 2 | 4.160.000,00 | 2 | 4.160.000,00 | 2 | 4.160.000,00 | |
| 5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| Prosentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | |
| 5.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | |
| 5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 170.463.400,00 | | 165.517.176,00 | | 170.748.613,00 | | 190.701.098,00 | | 190.701.098,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Administrasi Umum Pada Perangkat Daerah Terlaksana | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 170.463.400,00 | 1 | 165.517.176,00 | 1 | 170.748.613,00 | 1 | 190.701.098,00 | 1 | 190.701.098,00 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 40.001.100,00 | | 36.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 | 7 | 40.001.100,00 | 7 | 36.000.000,00 | 7 | 40.000.000,00 | 7 | 40.000.000,00 | 7 | 40.000.000,00 | | |
| 5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 20.001.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 20.001.000,00 | 1 | 20.000.000,00 | 1 | 20.000.000,00 | 1 | 20.000.000,00 | 1 | 20.000.000,00 | | |
| 5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.974.400,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 1 | 4.974.400,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | | |
| 5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 80.482.100,00 | | 80.517.176,00 | | 80.748.613,00 | | 100.701.098,00 | | 100.701.098,00 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 12 | 80.482.100,00 | 12 | 80.517.176,00 | 12 | 80.748.613,00 | 12 | 100.701.098,00 | 12 | 100.701.098,00 | | |
| 5.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 25.004.800,00 | | 24.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 | 4 | 25.004.800,00 | 4 | 24.000.000,00 | 4 | 25.000.000,00 | 4 | 25.000.000,00 | 4 | 25.000.000,00 | | |
| 5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 50.610.900,00 | | 46.000.000,00 | | 51.000.000,00 | | 51.000.000,00 | | 51.000.000,00 | | |
| Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 | 1 | 50.610.900,00 | 1 | 46.000.000,00 | 1 | 51.000.000,00 | 1 | 51.000.000,00 | 1 | 51.000.000,00 | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 4.547.900,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 | 4 | 4.547.900,00 | 4 | 5.000.000,00 | 4 | 5.000.000,00 | 4 | 5.000.000,00 | 4 | 5.000.000,00 | | |
| 5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 21.638.000,00 | | 21.000.000,00 | | 21.000.000,00 | | 21.000.000,00 | | 21.000.000,00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 | 4 | 21.638.000,00 | 4 | 21.000.000,00 | 4 | 21.000.000,00 | 4 | 21.000.000,00 | 4 | 21.000.000,00 | | |
| 5.03.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 24.425.000,00 | | 20.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | |
| Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 | 1 | 24.425.000,00 | 1 | 20.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | | |
| 5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 646.701.176,00 | | 646.701.176,00 | | 646.701.176,00 | | 646.701.176,00 | | 646.701.176,00 | | |
| Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 646.701.176,00 | 12 | 646.701.176,00 | 12 | 646.701.176,00 | 12 | 646.701.176,00 | 12 | 646.701.176,00 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 157.500.000,00 | | 157.500.000,00 | | 157.500.000,00 | | 157.500.000,00 | | 157.500.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 157.500.000,00 | 12 | 157.500.000,00 | 12 | 157.500.000,00 | 12 | 157.500.000,00 | 12 | 157.500.000,00 | | |
| 5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 489.201.176,00 | | 489.201.176,00 | | 489.201.176,00 | | 489.201.176,00 | | 489.201.176,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 489.201.176,00 | 12 | 489.201.176,00 | 12 | 489.201.176,00 | 12 | 489.201.176,00 | 12 | 489.201.176,00 | | |
| 5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 254.136.000,00 | | 276.688.846,00 | | 277.065.471,00 | | 277.588.760,00 | | 306.285.894,00 | | |
| Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 3 | 3 | 254.136.000,00 | 3 | 276.688.846,00 | 3 | 277.065.471,00 | 3 | 277.588.760,00 | 3 | 306.285.894,00 | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 85 | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 214.170.000,00 | | 236.445.000,00 | | 236.445.000,00 | | 236.445.000,00 | | 236.445.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 | 6 | 214.170.000,00 | 6 | 236.445.000,00 | 6 | 236.445.000,00 | 6 | 236.445.000,00 | 6 | 236.445.000,00 | | |
| 5.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | | |
| 5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 14.976.000,00 | | 14.976.000,00 | | 14.976.000,00 | | 14.976.000,00 | | 14.976.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 85 | 85 | 14.976.000,00 | 85 | 14.976.000,00 | 85 | 14.976.000,00 | 85 | 14.976.000,00 | 85 | 14.976.000,00 | | |
| 5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 24.990.000,00 | | 25.267.846,00 | | 25.644.471,00 | | 26.167.760,00 | | 54.864.894,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 1 | 24.990.000,00 | 1 | 25.267.846,00 | 1 | 25.644.471,00 | 1 | 26.167.760,00 | 1 | 54.864.894,00 | | |
| 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | 837.822.300,00 | | 847.200.000,00 | | 859.900.000,00 | | 877.500.000,00 | | 898.100.000,00 | | |
| Meningkatnya Produktivitas ASN | Nilai Sistem Merit pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin | 40 | 40 | 14.560.000,00 | 40 | 14.723.000,00 | 40 | 14.943.700,00 | 40 | 15.249.600,00 | 40 | 15.607.600,00 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 309.854.300,00 | | 313.322.600,00 | | 318.019.400,00 | | 324.528.500,00 | | 332.147.100,00 | | |
| Nilai 1 (Satu) Sub Aspek pada Aspek Pengembangaan Karir | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | | 3 | 4.560.000,00 | 3 | 9.894.300,00 | 3 | 9.894.300,00 | 3 | 9.894.300,00 | 3 | 9.894.300,00 | | |
| 5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN | | | | 4.560.000,00 | | 9.894.300,00 | | 9.894.300,00 | | 9.894.300,00 | | 9.894.300,00 | | |
| Meningkatnya Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | | 3 | 4.560.000,00 | 3 | 9.894.300,00 | 3 | 9.894.300,00 | 3 | 9.894.300,00 | 3 | 9.894.300,00 | | |
| Nilai 1 (satu) Sub Aspek pada Aspek Perlindungan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 3 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 4.828.700,00 | 1 | 5.049.400,00 | 1 | 5.355.300,00 | 1 | 5.713.300,00 | | |
| 5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | 10.000.000,00 | | 4.828.700,00 | | 5.049.400,00 | | 5.355.300,00 | | 5.713.300,00 | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 3 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 4.828.700,00 | 1 | 5.049.400,00 | 1 | 5.355.300,00 | 1 | 5.713.300,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksanannya pelayanan sesuai dengan stardat pelayanan (SP) dan Stadart Operasional Prosedur (SOP) | Nilai Sistem Merit pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan | 14 | 16 | 209.000.000,00 | 16 | 211.339.000,00 | 16 | 214.507.500,00 | 16 | 218.897.900,00 | 16 | 224.036.400,00 | | |
| 5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | 378.000.000,00 | | 382.230.800,00 | | 387.960.700,00 | | 395.901.200,00 | | 405.195.300,00 | | |
| Nilai 1 (satu) Sub Aspek pada Aspek Pelayanan | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 2 | 1 | 209.000.000,00 | 1 | 211.339.000,00 | 1 | 214.507.500,00 | 1 | 218.897.900,00 | 1 | 224.036.400,00 | | |
| | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | 9.000.000,00 | | 11.339.000,00 | | 14.507.500,00 | | 18.897.900,00 | | 24.036.400,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 2 | 1 | 9.000.000,00 | 1 | 11.339.000,00 | 1 | 14.507.500,00 | 1 | 18.897.900,00 | 1 | 24.036.400,00 | | |
| 5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | |
| Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 6 | 6 | 200.000.000,00 | 6 | 200.000.000,00 | 6 | 200.000.000,00 | 6 | 200.000.000,00 | 6 | 200.000.000,00 | | |
| Terlaksananya penataan dan pengisian jabatan sesuai dengan standart kompetensi jabatan (SKJ) yang di tetapkan | Nilai Sistem Merit pada Aspek Promosi dan Mutasi | 22,5 | 25 | 149.968.000,00 | 25 | 151.646.600,00 | 27.5 | 153.919.900,00 | 30 | 157.070.300,00 | 35 | 160.757.600,00 | | |
| 5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN | | | | 130.000.000,00 | | 131.646.600,00 | | 131.919.900,00 | | 135.070.300,00 | | 138.757.600,00 | | |
| Nilai komposit dari 3 (tiga) Sub Aspek pada Aspek Promosi dan Mutasi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 4 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 31.000.000,00 | 1 | 31.273.300,00 | 1 | 31.273.300,00 | 1 | 32.000.000,00 | | |
| 5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN | | | | 30.000.000,00 | | 31.000.000,00 | | 31.273.300,00 | | 31.273.300,00 | | 32.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 4 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 31.000.000,00 | 1 | 31.273.300,00 | 1 | 31.273.300,00 | 1 | 32.000.000,00 | | |
| Nilai komposit dari 4 (Empat) Sub Aspek pada Aspek Pengembangan Karir | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 3 | 5 | 100.000.000,00 | 5 | 100.646.600,00 | 5 | 100.646.600,00 | 5 | 103.797.000,00 | 5 | 106.757.600,00 | | |
| | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 14 | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | | |
| 5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 23.000.000,00 | | 24.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 14 | 14 | 20.000.000,00 | 14 | 20.000.000,00 | 14 | 20.000.000,00 | 14 | 23.000.000,00 | 14 | 24.000.000,00 | | |
| 5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN | | | | 80.000.000,00 | | 80.646.600,00 | | 80.646.600,00 | | 80.797.000,00 | | 82.757.600,00 | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 3 | 5 | 80.000.000,00 | 5 | 80.646.600,00 | 5 | 80.646.600,00 | 5 | 80.797.000,00 | 5 | 82.757.600,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03.02.2.03 - Pengem-bangan Kompetensi ASN | | | | 19.968.000,00 | | 20.000.000,00 | | 22.000.000,00 | | 22.000.000,00 | | 22.000.000,00 | | |
| Jumlah Nilai 1 (Satu) Sub Aspek Pada Aspek Informa-si | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 15 | 15 | 9.984.000,00 | 15 | 10.000.000,00 | 15 | 11.000.000,00 | 15 | 11.000.000,00 | 15 | 11.000.000,00 | | |
| 5.03.02.2.03.0004 - Pengel-olaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | 9.984.000,00 | | 10.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 15 | 15 | 9.984.000,00 | 15 | 10.000.000,00 | 15 | 11.000.000,00 | 15 | 11.000.000,00 | 15 | 11.000.000,00 | | |
| Nilai 1 (Satu) Sub Aspek Pada Aspek Pengem-bangan Karir | Jumlah Dokumen Pengel-olaan Assessment Center | 1 | 1 | 9.984.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | | |
| 5.03.02.2.03.0002 - Pengel-olaan Assessment Center | | | | 9.984.000,00 | | 10.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | |
| Terkelolanya Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengel-olaan Assessment Center | 1 | 1 | 9.984.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | | |
| Terpenuhinya Kebutuhan ASN | Nilai Sistem Merit pada Aspek Pengadaan | 40 | 40 | 150.000.000,00 | 40 | 151.679.000,00 | 40 | 153.952.400,00 | 40 | 157.103.400,00 | 40 | 160.791.900,00 | | |
| 5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Infor-masi Kepegawaian ASN | | | | 378.000.000,00 | | 382.230.800,00 | | 387.960.700,00 | | 395.901.200,00 | | 405.195.300,00 | | |
| Nilai komposit dari 4 (Em-pat) Sub Aspek pada Aspek Pengadaan | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 2 | 2 | 150.000.000,00 | 2 | 151.679.000,00 | 2 | 153.952.400,00 | 2 | 157.103.400,00 | 2 | 160.791.900,00 | | |
| 5.03.02.2.01.0003 - Koordi-nasi dan Fasilitasi Penga-daan PNS dan PPPK | | | | 150.000.000,00 | | 151.679.000,00 | | 153.952.400,00 | | 157.103.400,00 | | 160.791.900,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 2 | 2 | 150.000.000,00 | 2 | 151.679.000,00 | 2 | 153.952.400,00 | 2 | 157.103.400,00 | 2 | 160.791.900,00 | | |
| Tersedianya data capaian kinerja ASN | Nilai Sistem Merit pada Aspek Manajemen Kinerja | 67,5 | 67,5 | 295.294.300,00 | 70 | 298.599.600,00 | 70 | 303.075.700,00 | 70 | 309.278.900,00 | 70 | 316.539.500,00 | | |
| 5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 309.854.300,00 | | 313.322.600,00 | | 318.019.400,00 | | 324.528.500,00 | | 332.147.100,00 | | |
| Nilai kmposit dari 5 (lima) Sub Aspek pada Aspek Manajemen Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 10 | 10 | 45.294.300,00 | 10 | 48.599.600,00 | 10 | 53.075.700,00 | 10 | 59.278.900,00 | 10 | 66.539.500,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 6 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.03.02.2.04.0001 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | | |
| Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 | 1 | 5.200.000,00 | 1 | 5.200.000,00 | 1 | 5.200.000,00 | 1 | 5.200.000,00 | 1 | 5.200.000,00 | | |
| 5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 30.200.000,00 | | 31.399.600,00 | | 34.000.000,00 | | 38.000.000,00 | | 42.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 6 | 8 | 30.200.000,00 | 8 | 31.399.600,00 | 8 | 34.000.000,00 | 8 | 38.000.000,00 | 8 | 42.000.000,00 | | |
| 5.03.02.2.04.0003 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 9.894.300,00 | | 12.000.000,00 | | 13.875.700,00 | | 16.078.900,00 | | 19.339.500,00 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 10 | 10 | 9.894.300,00 | 10 | 12.000.000,00 | 10 | 13.875.700,00 | 10 | 16.078.900,00 | 10 | 19.339.500,00 | | |
| Nilai komposit dari 4 (empat) Sub Aspek pada Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 657 | 657 | 250.000.000,00 | 657 | 250.000.000,00 | 657 | 250.000.000,00 | 657 | 250.000.000,00 | 657 | 250.000.000,00 | | |
| 5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 657 | 657 | 250.000.000,00 | 657 | 250.000.000,00 | 657 | 250.000.000,00 | 657 | 250.000.000,00 | 657 | 250.000.000,00 | | |
| Tersedianya data kepegawaian yang valid, akurat, dan mutakhir | Nilai Sistem Merit pada Aspek Sistem Informasi | 19 | 20 | 16.600.000,00 | 22 | 16.785.900,00 | 22 | 17.037.500,00 | 22 | 17.386.200,00 | 22 | 17.794.300,00 | | |
| 5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | 378.000.000,00 | | 382.230.800,00 | | 387.960.700,00 | | 395.901.200,00 | | 405.195.300,00 | | |
| Nilai komposit dari 3 (Tiga) Sub Aspek pada Aspek Sistem Informasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 | 4 | 16.600.000,00 | 4 | 16.785.900,00 | 4 | 17.037.500,00 | 4 | 17.386.200,00 | 4 | 17.794.300,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | | |
| 5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | 6.600.000,00 | | 6.785.900,00 | | 7.037.500,00 | | 7.386.200,00 | | 7.794.300,00 | | |
| Terkelolanya Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 12 | 12 | 6.600.000,00 | 12 | 6.785.900,00 | 12 | 7.037.500,00 | 12 | 7.386.200,00 | 12 | 7.794.300,00 | | |
| Tersedianya rencana kebutuhan ASN | Nilai Sistem Merit pada Aspek Perencanaan Kebutuhan | 40 | 40 | 2.400.000,00 | 40 | 2.426.900,00 | 40 | 2.463.300,00 | 40 | 2.513.700,00 | 40 | 2.572.700,00 | | |
| 5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | 378.000.000,00 | | 382.230.800,00 | | 387.960.700,00 | | 395.901.200,00 | | 405.195.300,00 | | |
| Nilai komposit dari 4 (Empat) Sub Aspek pada Aspek Perencanaan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 2 | 2 | 2.400.000,00 | 2 | 2.426.900,00 | 2 | 2.463.300,00 | 2 | 2.513.700,00 | 2 | 2.572.700,00 | | |
| 5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | 2.400.000,00 | | 2.426.900,00 | | 2.463.300,00 | | 2.513.700,00 | | 2.572.700,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 2 | 2 | 2.400.000,00 | 2 | 2.426.900,00 | 2 | 2.463.300,00 | 2 | 2.513.700,00 | 2 | 2.572.700,00 | | |
| 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 270.015.400,00 | | 273.100.000,00 | | 277.200.000,00 | | 282.900.000,00 | | 289.600.000,00 | | |
| 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | 270.015.400,00 | | 273.100.000,00 | | 277.200.000,00 | | 282.900.000,00 | | 289.600.000,00 | | |
| Meningkatnya kapabilitas pegawai yang meliputi kemampuan teknis, manejerial dan sosio kultural | Nilai Sistem Merit pada Aspek Pengembangan Karir | 80 | 82,5 | 270.015.400,00 | 82,5 | 273.100.000,00 | 87,5 | 277.200.000,00 | 95 | 282.900.000,00 | 95 | 289.600.000,00 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | |
| Nilai 1 (Satu) Sub Aspek pada Aspek Pengembangan Karir | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 8 | 8 | 25.000.000,00 | 8 | 25.000.000,00 | 8 | 25.000.000,00 | 8 | 25.000.000,00 | 8 | 25.000.000,00 | | |
| 5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 8 | 8 | 25.000.000,00 | 8 | 25.000.000,00 | 8 | 25.000.000,00 | 8 | 25.000.000,00 | 8 | 25.000.000,00 | | |
| 5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | 245.015.400,00 | | 248.100.000,00 | | 252.200.000,00 | | 257.900.000,00 | | 264.600.000,00 | | |
| Nilai 1 (satu) sub Aspek pada Aspek Pengadaan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1 | 2 | 95.015.400,00 | 2 | 98.100.000,00 | 2 | 102.200.000,00 | 2 | 107.900.000,00 | 2 | 114.600.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | 95.015.400,00 | | 98.100.000,00 | | 102.200.000,00 | | 107.900.000,00 | | 114.600.000,00 | | |
| Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1 | 2 | 95.015.400,00 | 2 | 98.100.000,00 | 2 | 102.200.000,00 | 2 | 107.900.000,00 | 2 | 114.600.000,00 | | |
| Nilai komposit dari 3 (Tiga) Sub Aspek pada Aspek Pengembangan Karir | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | 2 | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 150.000.000,00 | | |
| 5.04.02.2.02.0008 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | 2 | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 150.000.000,00 | | |

## 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS**
**PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA**
**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Tersedianya rencana kebutuhan ASN | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Rekrutmen 1.000 tenaga pendidik baru - Unsur pemerintahan bidang kepegawaian |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan ASN | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Rekrutmen 500 tenaga kesehatan - Unsur pemerintahan bidang kepegawaian |
| | | Terlaksanannya pelayanan sesuai dengan stardat pelayanan (SP) dan Stadart Operasional Prosedur (SOP) | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | |
| | | Tersedianya data kepegawaian yang valid, akurat, dan mutakhir | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | |
| | | | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | |
| | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | |
| | | | Pengelolaan Data Kepegawaian | |
| | | Terlaksananya penataan dan pengisian jabatan sesuai dengan standart kompetensi jabatan (SKJ) yang di tetapkan | Mutasi dan Promosi ASN | Guru nyaman bekerja-Unsur pemerintahan bidang kepegawaian |
| | | | Pengelolaan Mutasi ASN | |
| | | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | |
| | | | Pengelolaan Promosi ASN | |
| | | | Pengembangan Kompetensi ASN | |
| | | | Pengelolaan Assessment Center | |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | |
| | | Tersedianya data capaian kinerja ASN | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Asn award - Unsur pemerintahan bidang kepegawaian |
| | | Meningkatnya Produktivitas ASN | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |
| | | | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |
| | | | Evaluasi Hasil Penilaian dan Eval- | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | uasi Kinerja Aparatur | |
| | | | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | |
| | | | Pembinaan Disiplin ASN | |
| | | | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | |
| | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Meningkatnya kapabilitas pegawai yang meliputi kemampuan teknis, manejerial dan sosio kultural | Pengembangan Kompetensi Teknis | |
| | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | |
| | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Kartu sae law care- Unsur pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan |
| | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi \Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | |
| | | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | |

## 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**
**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| | | | | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | |
| 2. | Indeks Sistem Merit | Indeks | 0,79 | 0,8 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | |

**Keterangan :** Baseline Indeks Sistem Merit penilaian tahun 2024.

## 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 5 INDIKATOR KINERJA KUNCI**
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA**
**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| | | | | | TARGET TAHUN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1. | 5.03 - KEPEGA-WAIAN | | | | | | | | | | |
| 2. | Nilai Sistem Merit pada Layanan Kepega-waian | positif | Nilai | 243 | 246 | 253 | 253 | 256 | 258 | 263 | |
| 3. | 5.04 - PEN-DIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | |
| 4. | Nilai Sistem Merit pada Layanan Pengem-bangan SDM | positif | Nilai | 80 | 80 | 82,5 | 82,5 | 87,5 | 95 | 95 | |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo 2025 - 2029 merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo akan menjadi pedoman arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD maupun sumber pendanaan lain.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029 digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo dan dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

Strategi atau grand design yang dikembangkan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan diantaranya adalah : Pengajuan rincian penyusunan kebutuhan dan pengadaan ASN berdasarkan penetapan kebutuhan ASN, Penataan ulang (Redistribusi) pegawai melalui mekanisme mutasi/promosi berdasarkan kebutuhan organisasi, Pemutakhiran data base kepegawaian melalui SIAP Online secara berkala, Pelaksanaan mutasi dan promosi yang didasarkan pada hasil manajemen talenta dan peraturan pola karier, Pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, Optimalisasi penilaian kompetensi pegawai melalui Assessment Center, Penerapan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai yang

terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian, Digitalisasi pelayanan kepegawaian, dan Optimalisasi penerapan Sistem Merit dalam manajeman ASN, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029 agar dapat dilaksanakan dengan baik sangat tergantung dari partisipasi aktif semua pihak serta kerjasama yang harmonis semua stakeholder yang terkait. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Renstra akan dievaluasi dan dipertimbangkan kembali isi dan rumusannya untuk dilakukan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perubahan. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan peralihan ini bertujuan untuk menyajikan berbagai hal penting terkait pelaksanaan perencanaan jangka menengah daerah dan menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas pembangunan, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan program. Tata cara pelaksanaan masa peralihan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Perlu segera disusun dokumen perencanaan spasial baik di level makro (RTRW) maupun di level mikro (RDTR) untuk melihat relevansi pencapaian target kinerja dan intervensi program dalam RPJMD dengan sebaran data spasial. Dengan demikian strategi pencapaian target dapat lebih spesifik.

Seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, agar melakukan koordinasi, baik pada tiap rumpun atau lintas

rumpun (Joint Outcomes) untuk memastikan pencapaian outcome RPJMD berjalan dengan efektif dan efisien;

### 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Mekanisme pengendalian melibatkan tim dari internal Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo seperti pelaksana urusan perencanaan dan pengawasan serta lembaga lain terkait untuk memantau progres, dengan evaluasi dilakukan setiap semester menggunakan indikator kinerja. Laporan kinerja disampaikan ke DPRD Kabupaten Probolinggo, dan hasil evaluasi menjadi dasar penyesuaian program. Untuk memastikan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025 – 2029 berjalan sesuai rencana, mekanisme pengendalian dan evaluasi meliputi: a) Jadwal evaluasi periodik, setiap triwulan atau tahunan, dengan laporan kemajuan disampaikan ke DPRD; b) Indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur pencapaian target, seperti capaian pembangunan infrastruktur, peningkatan IPM, atau penurunan angka kemiskinan; c) Mekanisme penyesuaian rencana berdasarkan hasil evaluasi, termasuk revisi program jika diperlukan; d) Pembentukan Tim Pengendali: Tim terdiri dari Bappeda, Inspektorat, dan perangkat daerah dan pihak lain terkait, dengan jadwal rapat bulanan untuk memantau progres dan tindak lanjutnya.

Demikian pedoman transisi, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

# INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

# 2025-2029

(0335) 8401503

https://inspektorat.probolinggo.go.id

Jl. Raya Panglima Sudirman 40
Semampir - Kraksaan, Kabupaten Probolinggo

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran arahan kebijakan dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Inspektorat Daerah. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Inspektorat Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Probolinggo, September 2025

Inspektur
Kabupaten Probolinggo

**IMRON ROSYADI, S.P., M.M**
*Pembina Utama Muda*
NIP. 19710526 199503 1 002

## DAFTAR ISI

**Kata Pengantar** ..... **i**
**Daftar Isi** ..... **iii**
**Daftar Tabel** ..... **v**
**Daftar Gambar** ..... **vi**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 9
1.4 Sistematika Penulisan ..... 11

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH** ..... **13**
2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah ..... 13
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah ..... 13
2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah ..... 22
2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah ..... 27
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah ..... 30
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah ..... 30
2.2.2 Isu Strategis ..... 35

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... **36**
3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ..... 36
3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ..... 37
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 ..... 42
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 ..... 43

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 47**

4.1 Uraian Program ..... 47

4.2 Uraian Kegiatan ..... 61

4.3 Uraian Indikator Kinerja Daerah ..... 68

4.4 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif ..... 73

4.5 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 86

4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah ..... 90

4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..... 94

**BAB IV PENUTUP ..... 95**

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Golongan ..... 22
Tabel 2.2 SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 23
Tabel 2.3 Jumlah Asset Yang Dimiliki Inspektorat Daerah ..... 24
Tabel 2.4 Realisasi Capaian Kinerja Inspektorat Daerah ..... 28
Tabel 2.5 Kelompok Sasaran Layanan ..... 29
Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Daerah ..... 31
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah ..... 40
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Inspektorat Daerah ..... 42
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah ..... 45
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat Daerah ..... 51
Tabel 4.2 Rencana Program dan Pendanaan Inspektorat Daerah ..... 67
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ..... 72
Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan Inspektorat Daerah ..... 74
Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 89
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Probolinggo ..... 92
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Probolinggo ..... 95

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo ..... 19
Gambar 3.1 Konsep Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo .. 37
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo ..... 39
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subgkegiatan Renstra Inspektorat Daerah ..... 50

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025-2029 **dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris)** dan **Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi)** yang telah di lantik pada tanggal 20 Februari 2025, menuangkan visi, misi, dan komitmen politik dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2025 hingga 2029.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Inspektorat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Inspektorat Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Inspektorat Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Inspektorat Daerah berkontribusi dalam

mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan unsur Pengawasan.

Dalam menyusun Renstra Inspektorat Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2045 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah yang disusun pada periode Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Inspektorat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Inspektorat Daerah berfungsi mengarahkan pelayanan Inspektorat Daerah dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Inspektorat Daerah disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Inspektorat Daerah akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Inspektorat Daerah dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Inspektorat Daerah untuk

mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Inspektorat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868)
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger- Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

38. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan;
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan; dan
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah paling sedikit memuat:
   a. Tugas, fungsi dan struktur Inspektorat Daerah;
   b. Sumber daya Inspektorat Daerah;
   c. Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah (termasuk capaian sesuai dengan tupoksinya); dan
   d. Kelompok sasaran layanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah paling sedikit memuat:
   a. Permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah; dan
   b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra Inspektora Daerah Tahun 2025 – 2029;
2. Sasaran Renstra Inspektora Daerah Tahun 2025 – 2029;
3. Strategi Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029; dan
4. Arah kebijakan Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

### 2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas:

a. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat daerah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektur Kabupaten Probolinggo mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Perumusan program kerja;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
5. Pelaksanaan pengawasan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi;
9. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

10. Pelaksanaan pembinaan terhadap sekretariat, inspektur pembantu dan kelompok jabatan fungsional; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di Lingkungan Inspektorar Daerah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi, diantaranya adalah:

1. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
2. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan kinerja;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di Lingkungan Inspektorat Daerah;
4. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan di Lingkungan Inspektorat Daerah;
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
6. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
7. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP); dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

a) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas untuk melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan

keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi diantaranya adalah:

1) Pelaksanaan adminitrasi kepegawaian;
2) Pelaksanaan urusan tata usaha dan pembinaan tata usaha;
3) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
4) Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
5) Pelaksanaan perbendaharaan;
6) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas diantaranya adalah:

1) Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
2) pengoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
3) Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
4) Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
5) Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja inspektorat daerah;
6) Pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran;
7) Pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;

8) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
9) Pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
10) Pelaksanaan pemantauan,evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan Pemerintahan Kelurahan/Desa, tugas pembantuan dan urusan meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah dibidang Pemerintahan dan Aparatur.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi, diantaranya adalah:

1. Perumusan program kerja bidang pemerintahan dan aparatur;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksaaan urusan Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Kelurahan/Desa;
4. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
5. Pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kelurahan/Desa dibidang

pemerintahan dan aparatur melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

6. Pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
7. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
8. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
9. Penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
10. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan dan aparatur; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

d. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan Pemerintahan Kelurahan/Desa, tugas pembantuan dan urusan untuk meningkatkan presentase kinerja Perangkat Daerah dibidang keuangan dan aset.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi, diantaranya adalah:

1. Penyusunan program kerja bidang keuangan dan aset;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang keuangan dan aset;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan

Kelurahan/Desa dan sebagian urusan bidang keuangan dan aset;

4. Pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan dan aset melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
5. Pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
6. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang keuangan dan aset;
7. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
8. Penyusunan laporan hasil pengawasan bidang keuangan dan aset;
9. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang keuangan dan aset; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan Kelurahan/Desa, tugas pembantuan dan urusan meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi, diantaranya adalah:

1. Penyusunan program kerja bidang perekonomian;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang perekonomian;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan Kelurahan/Desa dan urusan dibidang perekonomian;
4. Pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
5. Pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
6. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang perekonomian;
7. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
8. Penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perekonomian;
9. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang perekonomian; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

f. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan Kelurahan/Desa, tugas pembantuan dan meningkatkan persentase kinerja perangkat daerah dibidang kesejahteraan sosial dan budaya.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi, diantaranya adalah:

1. Penyusunan program kerja bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
4. Pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial dan budaya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
5. Pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
6. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
7. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
8. Penyusunan laporan hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
9. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang kesejahteraan sosial dan budaya; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

g. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan Kelurahan/Desa, tugas pembantuan dan meningkatkan presentase kinerja dibidang pencegahan tindak

pidana korupsi, investigasi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi, diantaranya adalah:

1. Penyusunan program kerja bidang investigasi;
2. Penyusunan pedoman dan kebijakan teknis dibidang investigasi dan pengawasan reformasi birokrasi;
3. Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
4. Pelaksanaan koordinasi teknis pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
6. Pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah/ kelurahan/desa;
7. Pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah/kelurahan/desa;
8. Pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
10. Penyusunan laporan hasil pengawasan dibidang investigasi;
11. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang investigasi; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**Gambar 2.1**

**SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH**

**KABUPATEN PROBOLINGGO**

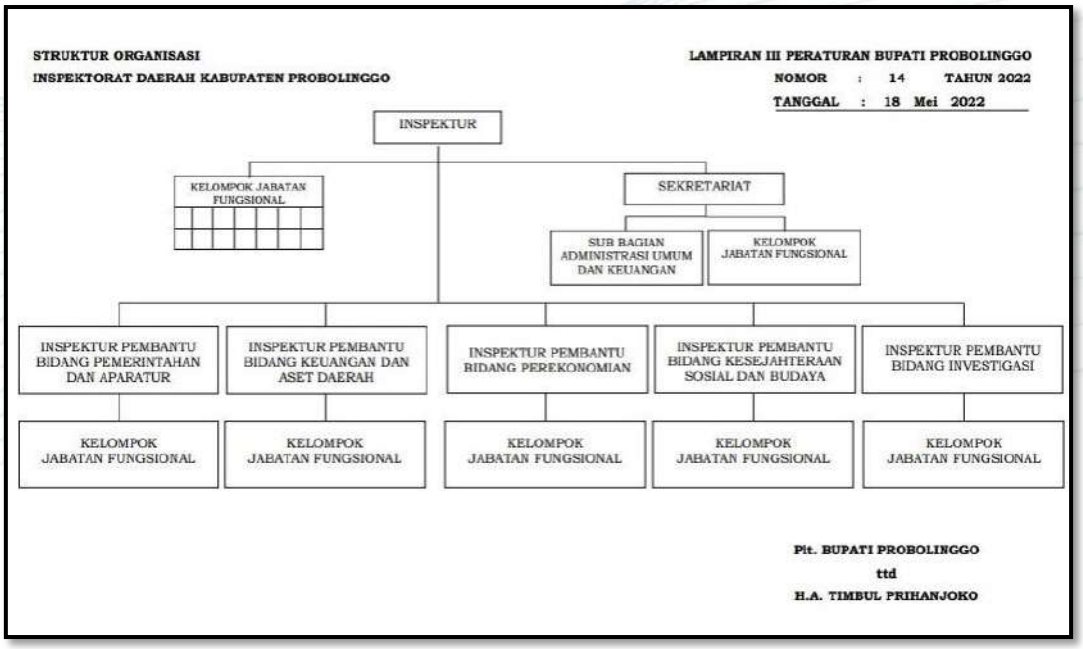


### 2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Inspektorat Daerah.

Adapun sumber daya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo sebanyak 83 orang, yang terdiri dari:

**Tabel 2.1**

**SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo**

**Berdasarkan Golongan**

| No | Uraian | Golongan | | | | | | Tanpa Golongan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | XIII | IX | | |
| 1 | Inspektur | | | | 1 | | | | |
| 2 | Sekretariat | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | Bidang Pemerintahan dan Aparatur | | | | 1 | | | | |
| 4 | Bidang Keuangan dan Aset | | | | 1 | | | | |
| 5 | Bidang Perekonomian | | | | 1 | | | | |
| 6 | Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya | | | | 1 | | | | |
| 7 | Bidang Investigasi | | | | 1 | | | | |
| 8 | PNS Jabatan Fungsional | | | | | | | | |
| | a. Auditor | | 8 | 28 | 2 | | | | |
| | b. PPUPD | | | 22 | | | | | |
| 9 | Tenaga Alih Daya | | | | | | | 9 | |
| **Jumlah** | | | **12** | **51** | **9** | **1** | **1** | **9** | |

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo sebanyak 83 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

**Tabel. 2.2**

**SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo**

**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No | Uraian | Tingkat Pendidikan | | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SLTA | DIII | DIV | S1 | S2 | |
| 1 | Inspektur | | | | | 1 | |
| 2 | Sekretariat | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| 3 | Bidang Pemerintahan dan Aparatur | | | 1 | | | |
| 4 | Bidang Keuangan dan Aset | | | | | 1 | |
| 5 | Bidang Perekonomian | | | | | 1 | |
| 6 | Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya | | | | | 1 | |
| 7 | Bidang Investigasi | | | | | 1 | |
| 8 | PNS Jabatan Fungsional | | | | | | |
| | a. Auditor | | 9 | | 16 | 13 | |
| | b. PPUPD | | | 2 | 15 | 5 | |
| 9 | Tenaga Ahli Daya | 5 | | | 4 | | |
| **Jumlah** | | **7** | **11** | **3** | **37** | **25** | |

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkpan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Jumlah Asset Yang Dimiliki Inspektorat Daerah**

| No | Nama Barang | Jumlah |
|---|---|---|
| **A** | **ALAT BESAR** | |
| 1 | Pompa Air | 1 |
| **B** | **ALAT ANGKUTAN** | |
| 1 | Station Wagon | 5 |
| 2 | Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 4 |
| 3 | Sepeda Motor | 21 |
| **C** | **ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR** | |

| No | Nama Barang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) lainnya (dst) | 3 |
| 2 | Digital Tachometer | 3 |
| 3 | Rol Meter | 3 |
| 4 | Alat ukur universal  lainnya (dst) | 1 |
| 5 | Alat ukur/test klinis lain  lainnya (dst) | 5 |
| 6 | Scanner (Universal Tester) | 1 |
| 7 | Bejana Ukur | 1 |
| 8 | ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) | 14 |
| **D** | **ALAT PERTANIAN** | |
| 1 | Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya | 2 |
| **E** | **ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA** | |
| 1 | Mesin Fotocopy Folio | 1 |
| 2 | Lemari Besi/Metal | 21 |
| 3 | Lemari Kayu | 1 |
| 4 | Filing Cabinet Besi | 8 |
| 5 | Brandkas | 6 |
| 6 | Lemari Sorok | 1 |
| 7 | CCTV - Camera Control Television System | 1 |
| 8 | Papan Visual/Papan Nama | 2 |
| 9 | White Board | 1 |
| 10 | Alat Penghancur Kertas | 8 |
| 11 | Alat Pemotong Kertas | 2 |
| 12 | LCD Projector/Infocus | 2 |
| 13 | Meja Kerja Kayu | 9 |
| 14 | Kursi Besi/Metal | 80 |
| 15 | Meja Rapat | 25 |
| 16 | Meja Resepsionis | 1 |
| 17 | Meja Tambahan | 14 |
| 18 | Sketsel | 5 |
| 19 | Kursi Rapat | 30 |
| 20 | Kursi Tamu | 2 |
| 21 | Kursi Lipat | 2 |
| 22 | Filling Besi/Metal | 18 |
| 23 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 1 |
| 24 | Lemari Es | 2 |
| 25 | A.C. Window | 17 |
| 26 | A.C. Split | 7 |
| 27 | Exhause Fan | 2 |
| 28 | A.C. Unit | 1 |
| 29 | Kitchen Set | 1 |
| 30 | Televisi | 5 |
| 31 | Sound System | 2 |

| No | Nama Barang | Jumlah |
|---|---|---|
| 32 | Wireless | 1 |
| 33 | Microphone Floor Stand | 2 |
| 34 | Camera Video | 22 |
| 35 | Dispenser | 11 |
| 36 | Handy Cam | 2 |
| 37 | Karpet | 30 |
| 38 | Gordyin/Kray | 1 |
| 39 | Bracket Standing Peralatan | 1 |
| 40 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 |
| 41 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 2 |
| 42 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 2 |
| 43 | Lain-lain Meja Kerja Pejabat | 3 |
| 44 | Meja Rapat Pejabat Eselon II | 1 |
| 45 | Meja Operator | 1 |
| 46 | Lain-lain Meja Rapat | 7 |
| 47 | Meja Rapat Pejabat Lain-Lain | 17 |
| 48 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 2 |
| 49 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 9 |
| 50 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 6 |
| 51 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 20 |
| 52 | Kursi kerja staff | 6 |
| 53 | Kursi Kerja | 8 |
| 54 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf | 15 |
| 55 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain | 23 |
| 56 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-Lain | 9 |
| 57 | Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III | 1 |
| 58 | Lemari Buku Untuk Perpustakaan | 2 |
| 59 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 8 |
| **F** | **ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR** | |
| 1 | Audio Amplifier | 1 |
| 2 | Microphone/Wireless MIC | 15 |
| 3 | Camera Film | 11 |
| 4 | Lensa Kamera | 1 |
| 5 | Layar Film/Projector | 2 |
| 6 | Camera Conference | 1 |
| 7 | Camera + Attachment | 1 |
| 8 | Printer | 2 |
| 9 | Handy Talky (HT) | 3 |
| 10 | Facsimile | 1 |
| 11 | Alat Komunikasi Radio VHF Lain-Lain | 16 |
| **G** | **ALAT LABORATORIUM** | |
| 1 | Hand Roll | 1 |
| 2 | TV Monitor | 1 |

| No | Nama Barang | Jumlah |
|---|---|---|
| 3 | Air Purlier | 1 |
| **H** | **KOMPUTER** | |
| 1 | Lain-lain Komputer Jaringan | 1 |
| 2 | P.C Unit | 17 |
| 3 | Lap Top | 64 |
| 4 | Note Book | 13 |
| 5 | lain-lain Personal Komputer | 18 |
| 6 | Komputer Unit Lainnya | 6 |
| 7 | Hard Disk | 4 |
| 8 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 1 |
| 9 | Speaker Komputer | 5 |
| 10 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 40 |
| 11 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 12 |
| 12 | External/ Portable Hardisk | 22 |
| 13 | Hard disk Eksternal | 5 |
| 14 | Modem | 2 |
| **TOTAL** | | **822** |

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Inspektorat Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat Daerah dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2020 – 2024 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, AmanahReligius serta Eksis Berdaya Saing"***. Adapun pengertian visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan visi sebagai daerah yang sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1** : **SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1** : **Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintah dengan indikator sasaran berupa Nilai SAKIP dan Maturitas SPIP. Adapun Realisasi Capaian terhadap Indikator Kinerja Inspektorat Daerah dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**

**Realisasi Capaian Kinerja Inspektorat Daerah**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah | Realisasi Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) | - | 71,12 | 69,25 | 75,36 | 71,65 |
| 2 | MATURITAS SPIP | 3,000 | - | 3,117 | 3,110 | 3,116 |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah | Realisasi Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3 | MRI | 1,45 | - | 2,713 | 2,710 | 2,788 |
| 4 | IEPK | - | - | 1,660 | 1,660 | 2,742 |
| 5 | KAPABILITAS APIP | 2 Plus | 2,906 | 2,906 | 2,900 | 3,000 |
| 6 | SAKIP | 72,41 | 68,01 | 68,68 | 67,43 | 67,11 |
| 7 | LHE AKIP INSPEKTORAT DAERAH | 76,80 | 77,15 | 79,51 | 80,11 | 80,70 |

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah biasanya berkaitan dengan pihak-pihak yang menjadi objek pengawasan, pembinaan, maupun penerima manfaat atas fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Kelompok Sasaran Layanan**

| No | Kelompok Sasaran | Uraian Layanan / Tujuan |
|---|---|---|
| 1 | Pimpinan Daerah | Memberikan jaminan akuntabilitas, laporan hasil pengawasan, serta rekomendasi perbaikan kebijakan. |
| 2 | Perangkat Daerah | Pengawasan program/kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, akuntabilitas penggunaan anggaran dan Aset. |
| 3 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | Pembinaan integritas, kepatuhan, peningkatan disiplin, dan etika penyelenggara pemerintahan. |
| 4 | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Pengawasan tata kelola, kepatuhan regulasi, efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pencegahan fraud/korupsi dan Aset. |
| 5 | Desa/Kelurahan | Audit dan reviu pengelolaan dana desa/kelurahan, pembinaan aparatur desa, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dan Aset Desa. |
| 6 | Masyarakat/Pemangku Kepentingan | Pelayanan pengaduan masyarakat, transparansi, penanganan laporan dugaan penyimpangan. |

| No | Kelompok Sasaran | Uraian Layanan / Tujuan |
|---|---|---|
| 7 | Pemerintah Pusat & Lembaga Eksternal | Koordinasi dan sinergi pengawasan dengan BPKP, BPK, KPK, Kemendagri, Ombudsman, dll. |

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Inspektur Daerah Kabupaten Probolinggo mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Pengawasan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pengawasan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.6**

**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Daerah**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS GLOBAL | ISU LINGKUNGAN DINAMIS NASIONAL | ISU LINGKUNGAN DINAMIS REGIONAL | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan korupsi. | Kelemahan pengendalian internal, keterbatasan SDM APIP, rendahnya kualitas pengawasan berbasis risiko, serta rendahnya kepatuhan perangkat daerah terhadap rekomendasi Inspektorat.<br>• Kurangnya kompetensi yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo<br>• Peningkatan kapasitas SDM | Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan) dalam perencanaan dan anggaran; pengawasan pemenuhan daya dukung lingkungan; pencegahan penyalahgunaan anggaran program lingkungan. | Perubahan iklim global, degradasi lingkungan, tuntutan SDGs dan tata kelola berkelanjutan. | Implementasi RPJMN yang mengarusutamakan KLHS, pengendalian korupsi di sektor lingkungan, dan regulasi nasional tentang pengelolaan lingkungan. | Kerusakan ekosistem daerah, bencana banjir, kekeringan, abrasi pantai, sampah dan pencemaran lokal. | Meningkatkan kapabilitas APIP; memastikan akuntabilitas program berbasis lingkungan; penguatan fungsi pengawasan internal untuk pencegahan korupsi; peningkatan integritas dan tata kelola pemerintahan berkelanjutan. |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS GLOBAL | ISU LINGKUNGAN DINAMIS NASIONAL | ISU LINGKUNGAN DINAMIS REGIONAL | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | perangkat daerah penunjang pelaksanaan SPI<br>• Alokasi penempatan SDM tidak sesuai dengan yang dibutuhkan<br>• Zona integritas dipandang sebagai proyek semata untuk mendapatkan predikat, sehingga upaya *continuous improvement* masih rendah<br>• Kinerja belum menjadi dasar pembangunan Zona Integritas<br>• Inovasi yang dibangun tidak sesuai/berdampak langsung pada kinerja, penguatan integritas maupun | | | | | |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS GLOBAL | ISU LINGKUNGAN DINAMIS NASIONAL | ISU LINGKUNGAN DINAMIS REGIONAL | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | kemudahan pelayanan<br>• Pelaksanaan SPI perangkat daerah belum berjalan secara optimal<br>• Masih terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa<br>• Tuntutan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo<br>• Tuntutan masyarakat terhadap pelanggaran | | | | | |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS GLOBAL | ISU LINGKUNGAN DINAMIS NASIONAL | ISU LINGKUNGAN DINAMIS REGIONAL | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel serta bersih dari KKN<br>• Masyarakat masih belum puas terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan | | | | | |

### 2.2.2 Isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel serta bersih dari KKN;
2. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
3. Tuntuan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP; dan
4. Tuntutan peningkatan terhadap Manajemen Risiko.

# BAB III

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029

Konsep Tujuan, Sasaran Inspektorat Daerah terbentuk dalam bagan di bawah :

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dapat dilihat sebagai berikut :

**Misi 1 : " SAE PEMERINTAHAN Menciptakan Tatakelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"**

**Tujuan 1 : " Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional"**

**Indikator Tujuan : "Indeks Reformasi Birokrasi"**

**Sasaran 1 : "Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah"**

**Indikator Sasaran :**

1. Nilai SAKIP
2. Maturitas SPIP

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah

Indikator : 1. Nilai SAKIP;

2. Maturitas SPIP

**Gambar 3.1**

**Konsep Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo**

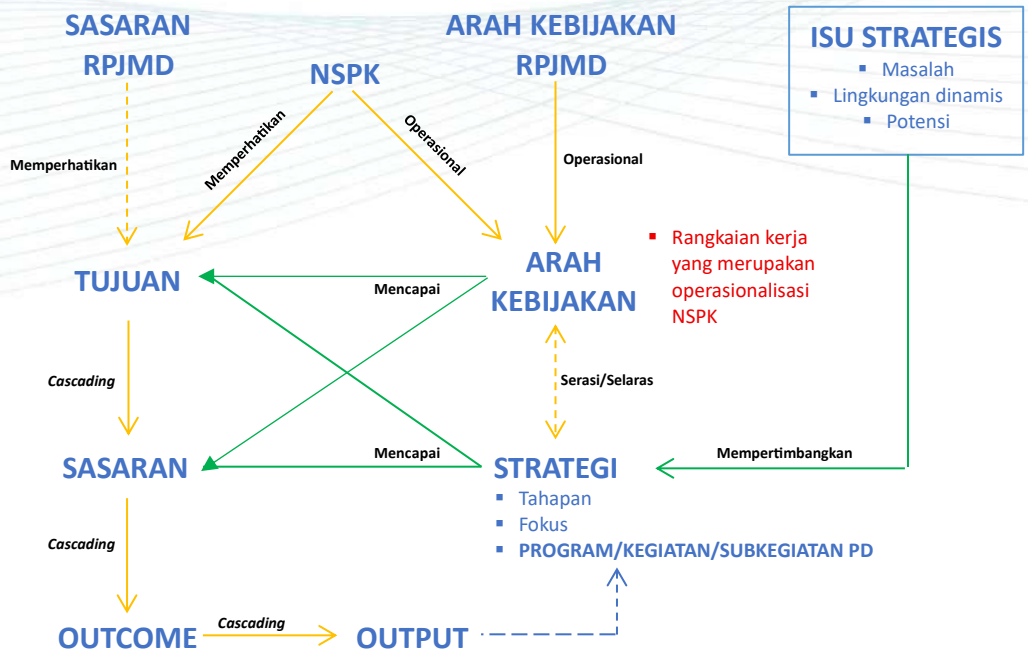


## 3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029

Sasaran Strategis Inspektorat Daerah tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yaitu ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, AmanahReligius serta Eksis Berdaya Saing"***.

Amanah religius memiliki penjelasan Keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Probolinggo mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas tinggi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai anti-korupsi sehingga menjadi pemerintah yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah daerah juga mampu menyelenggarakan pembangunan secara efektif melalui kolaborasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan sehingga terwujud pemerintahan yang SAE (baik) hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat

Daerah yaitu Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Gambar 3.2**
**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo**

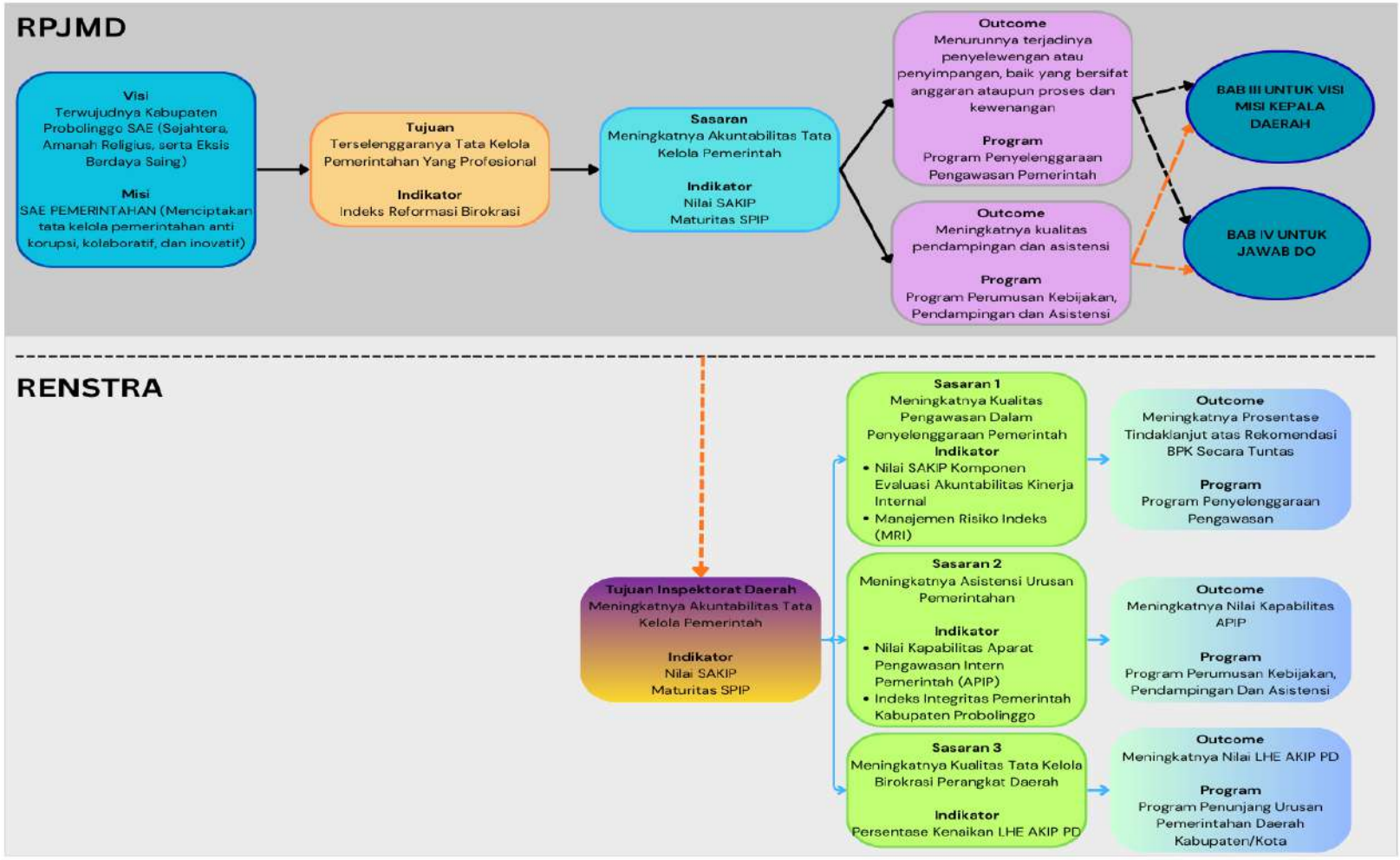

## Tabel 3.1

## Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat** | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah | | Nilai SAKIP (Nilai) | 67,11 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | |
| | | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) | 3.117 | 3.137 | 3.157 | 3.177 | 3.197 | 3.217 | 3.237 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah | Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai) | 13,65 | 17,63 | 17,75 | 17,88 | 18,00 | 18,13 | 18,25 | |
| | | | Manajemen Risiko Indeks (MRI) (Indeks) | 2,788 | 2,807 | 2,847 | 2,885 | 2,923 | 2,960 | 3,000 | |
| | | Meningkatnya Asistensi Urusan Pemerintahan | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai) | 3,000 | 3,010 | 3,020 | 3,030 | 3,040 | 3,050 | 3,060 | |
| | | | Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Indeks) | 71,65 | 72,85 | 74,05 | 75,25 | 76,45 | 77,65 | 78,85 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata | Prosentase Kenaikan LHE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | Kelola Perangkat Daerah | AKIP Perangkat Daerah (%) | | | | | | | | |

## 3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencna Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Inspektorat Daerah.

Adapun tahapan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 yang berisikan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah. Penahapan Renstra Inspektorat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**
**Penahapan Renstra Inspektorat Daerah**

| TAHAP I 2026 | TAHAP II 2027 | TAHAP III 2028 | TAHAP IV 2029 | TAHAP V 2030 |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| Penguatan Dasar dengan Penataan organisasi, peningkatan kompetensi SDM, penyusunan standar pengawasan berbasis risiko | Penguatan Sistem dengan Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terintegrasi, optimalisasi peran APIP dalam pengawasan kinerja. | Penguatan Kapasitas SDM dengan Peningkatan Kapabilitas APIP ke level 3, memperluas pengawasan berbasis teknologi informasi (e-audit, e-reviu). | Penguatan Kemandirian dengan mendorong Inspektorat Daerah berperan sebagai trusted advisor Pemerintah Daerah, fokus pada pencegahan korupsi dan kolaborasi pengawasan. | Adaptif dengan mendorong Inspektorat Daerah berperan sebagai katalis tata kelola, berstandar nasional/ internasional, adaptif terhadap dinamika global dan digital governance. |

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Inspektorat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah

Indikator : 1. Nilai SAKIP
2. Maturitas SPIP

Arah Kebijakan:

a. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja;
b. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh perangkat daerah;
c. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas tindak lanjut hasil pengawasan (APIP, BPK, BPKP).

Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah”

Indikator : 1. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal,
2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Arah Kebijakan:

a. Peningkatan kualitas audit kinerja, audit keuangan, reviu, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. Pengembangan dan penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah;
c. Penguatan kompetensi Auditor dan PPUPD sebagai pengawas internal untuk mendukung pengawasan berbasis risiko.

Sasaran 2 : “Meningkatnya Asistensi Urusan Pemerintahan”

Indikator : 1. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
2. Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Arah Kebijakan:

a. Peningkatan level Kapabilitas APIP melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi Auditor dan PPUPD;
b. Pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah dalam penerapan SPIP, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan verifikasi pencegahan /pemberantasan korupsi.
d. Penguatan budaya integritas dan etika aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran 3 : “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah”

Indikator : Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah

Arah Kebijakan:

a. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah;
b. Reviu laporan kinerja perangkat daerah untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas;
c. Peningkatan kualitas koordinasi dan asistensi dalam penyusunan LHE AKIP.

**Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah**

| No | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah | Membangun Pemerintahan yang bersih dan anti korupsi (Zona Integritas) dengan penilaian kinerja pegawai yang lebih terukur. | 1. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.<br>2. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh perangkat daerah.<br>3. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas tindak lanjut hasil pengawasan (APIP, BPK, BPKP). | Peningkatan kompetensi Auditor dan PPUPD melalui pelatihan dan sertifikasi.<br>Penambahan jumlah Auditor dan PPUPD sesuai kebutuhan. |
| | | Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara terbuka bersama masyarakat. | Optimalisasi peran pengawasan berbasis risiko<br>Digitalisasi pengawasan<br>Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan APIP Pusat dan APH | Penyusunan peta risiko perangkat daerah.<br>– Pengembangan atau integrasi aplikasi pengawasan daerah.<br>– Pemanfaatan e-audit<br>– Forum koordinasi pengawasan daerah (Forkopda). |

| No | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | | | Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan | – Monitoring berkala atas status rekomendasi. |
| | | | Mendorong budaya integritas dan anti-korupsi | – Sosialisasi nilai-nilai integritas.<br>– Penguatan pengawasan berbasis partisipatif (*whistleblowing system*). |

# BAB IV

# PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 4.1 Uraian Program

Program yang digunakan oleh Inspektorat Daerah ada 3 (tiga) program yang akan mendukung capaian kinerja sebagaimana di amanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
   a. Dukungan administrasi perkantoran dan operasional Inspektorat;
   b. Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
   c. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, serta sarana prasarana kantor;
   d. Pengembangan kompetensi auditor dan pejabat fungsional pengawas.
2. Uraian Program Penyelenggaraan Pengawasan
   a. Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
   b. Audit Kinerja → menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah;
   c. Audit Kepatuhan → menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan;
   d. Audit Tujuan Tertentu (ATT) → pemeriksaan khusus sesuai kebutuhan (misalnya dana hibah, bansos, BTT);
   e. Reviu Dokumen → RKA, DPA, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan dokumen lainnya;

f. Evaluasi → Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan kinerja perangkat daerah;
g. Monitoring → tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, maupun APIP;
h. Pembinaan dan Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
i. Meningkatkan kapabilitas APIP menuju level 3 sesuai pedoman BPKP.
j. Pendampingan perangkat daerah dalam manajemen risiko, perencanaan, dan pengendalian intern;
k. Pencegahan Korupsi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
l. Pengelolaan sistem pengaduan masyarakat (verifikasi, klarifikasi, tindak lanjut);
m. Investigasi awal atas dugaan penyimpangan atau pelanggaran;
n. Sosialisasi dan edukasi anti korupsi di perangkat daerah;
o. Pendampingan program/kegiatan strategis untuk mencegah terjadinya penyimpangan;
p. Laporan Hasil Pengawasan;
q. Penyusunan Laporan Hasil Audit, Reviu, dan Evaluasi (LHA/LHR/LHE);
r. Penyampaian rekomendasi hasil pengawasan kepada kepala daerah dan perangkat daerah terkait;
s. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

3. Uraian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
a. Perumusan Kebijakan Pengawasan;
b. Penyusunan rencana pengawasan tahunan (PKPT) berdasarkan prioritas pembangunan daerah, hasil evaluasi, dan risiko strategis;
c. Penetapan pedoman teknis pengawasan (SOP audit, reviu, evaluasi, monitoring);
d. Harmonisasi kebijakan pengawasan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat (BPKP, KemenPANRB, Kemendagri);

e. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Pendampingan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah;
g. Pendampingan penerapan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi;
h. Pendampingan pelaksanaan program/kegiatan strategis agar sesuai dengan ketentuan;
i. Asistensi Peningkatan Akuntabilitas;
j. Asistensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
k. Asistensi pengisian dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
l. Asistensi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah (LKPD);
m. Asistensi implementasi reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi;
n. Pembinaan Kapasitas Aparatur dan Perangkat Daerah;
o. Sosialisasi peraturan dan kebijakan terbaru terkait pengawasan, SPIP, dan akuntabilitas
p. Workshop/pelatihan teknis pengawasan bagi APIP dan perangkat daerah.

**Gambar 4.1**

**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan**

**Renstra Inspektorat Daerah**

## Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat Daerah

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 – Inspektorat | | | | | | | |
| - Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah | | | | Nilai SAKIP | | |
| | | | | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah | | | Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | | |
| | | | | | Manajemen Risiko Indeks (MRI) | | |
| | | | Meningkatnya Prosentase Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK Secara Tuntas | Pencegahan dan Deteksi Penyimpangan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal | |
| | | | | | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa | |
| | | | | | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | |
| | | | | Terwujudnya perbaikan tata kelola, pengelolaan keuangan, dan peningkatan kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | |
| | | | | | | 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | |
| | | Meningkatnya Asistensi Urusan Pemerintahan | | | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Probolinggo | | |
| | | | Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | | Kenaikan Capaian Nilai Kapabilitas APIP | 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | |
| | | | | Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | |
| | | | | Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi Kepada Perangkat Daerah Yang Telah Dilakukan | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi | |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi | |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian | 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi | |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian | 6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | |
| | | | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD | 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | Meningkatnya dokumen administrasi keuangan tersusun | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah terlaksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah terlaksana | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan da Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 6.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan | 6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 6.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan :

a. Menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
b. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah;
c. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta potensi kerugian daerah.

Ruang Lingkup :

a. Audit kinerja, audit keuangan, audit tujuan tertentu, serta audit dengan tujuan investigatif sesuai kebutuhan;
b. Review Penelaahan atas dokumen perencanaan, laporan keuangan, maupun laporan kinerja perangkat daerah;
c. Evaluasi Penilaian atas kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah;
d. Pemantauan (Monitoring) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal (BPK, KPK, BPKP);
e. Kegiatan Pengawasan Lainnya;
f. Audit probity, audit teknologi informasi, reviu atas pengadaan barang/jasa, hingga penilaian risiko penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Output Kegiatan :

a. Laporan hasil audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya;
b. Rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
c. Data/informasi hasil pengawasan sebagai bahan pengambilan keputusan kepala daerah.

Manfaat :

a. Mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah;
b. Meminimalisasi potensi penyimpangan, kecurangan, dan korupsi;
c. Memberikan nilai tambah melalui rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerja perangkat daerah.

Uraian Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas aspek tertentu dari program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan kebutuhan kepala daerah, permintaan perangkat daerah, atau indikasi adanya permasalahan khusus yang bertujuan:

a. Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian, ketepatan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan pada aspek tertentu yang diperiksa;
b. Mengidentifikasi permasalahan spesifik yang memerlukan perbaikan cepat;
c. Menyediakan rekomendasi yang bersifat operasional dan strategis untuk mendorong perbaikan tata kelola.

Ruang Lingkup :

a. Audit dengan tujuan tertentu (spesial audit), misalnya:
b. Pemeriksaan atas dugaan penyimpangan tertentu;
c. Pemeriksaan kepatuhan terhadap aturan dalam aspek spesifik (contoh: pengadaan barang/jasa, hibah/bansos, perjalanan dinas, aset);
d. Pemeriksaan atas kasus aduan masyarakat;
e. Audit ketaatan pada regulasi sektoral tertentu;
f. Pendalaman terhadap area yang tidak tercakup dalam audit kinerja atau audit keuangan reguler.

Output dari Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (LHP-TT), yang berisi:

a. Temuan dan analisis permasalahan;
b. Rekomendasi tindak lanjut perbaikan;
c. Bahan pertimbangan bagi kepala daerah dalam pengambilan keputusan.

Indikator Kinerja Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

a. Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun dan disampaikan sesuai standar pengawasan.

Manfaat Pengawasan dengan Tujuan Tertentu:

b. Membantu mendeteksi dini potensi penyimpangan dan permasalahan;
c. Memberikan dasar obyektif bagi perbaikan tata kelola dan pengendalian intern;
d. Mendukung peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Uraian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan adalah kegiatan penyusunan, pengembangan, serta pemberian dukungan teknis yang berkaitan dengan kebijakan, pedoman, standar, dan metodologi pengawasan internal guna memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik yang bertujuan:

a. Menyediakan landasan teknis yang seragam bagi pelaksanaan pengawasan internal;
b. Meningkatkan kualitas dan konsistensi penyelenggaraan pengawasan di perangkat daerah;
c. Memberikan fasilitasi, bimbingan, dan asistensi kepada perangkat daerah terkait penerapan pengawasan internal.

Ruang Lingkup Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan:

a. Perumusan Kebijakan Teknis;
b. Penyusunan pedoman pengawasan, standar audit, standar reviu, standar evaluasi, dan monitoring;
c. Penetapan kebijakan teknis dalam penanganan tindak lanjut hasil pengawasan;
d. Penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di bidang pengawasan.

Fasilitasi Pengawasan :

a. Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, asistensi, dan pendampingan pengawasan di perangkat daerah;
b. Koordinasi dengan APIP lain (BPKP, Inspektorat Jenderal pada Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota) dalam rangka sinergi pengawasan;
c. Fasilitasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko di perangkat daerah.

Output Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan:

a. Dokumen kebijakan teknis/pedoman/standar pengawasan.
b. Laporan fasilitasi, asistensi, atau bimbingan teknis pengawasan.
c. Rekomendasi kebijakan pengawasan untuk kepala daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan:

a. Jumlah kebijakan teknis/pedoman/standar pengawasan yang dirumuskan;
b. Jumlah perangkat daerah yang mendapat fasilitasi pengawasan.

Manfaat Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan:

a. Tersedianya pedoman teknis yang seragam dalam pelaksanaan pengawasan internal;
b. Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam menerapkan pengendalian intern;
c. Terciptanya sinergi pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Uraian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi adalah kegiatan pemberian dukungan, bimbingan, arahan, serta solusi teknis oleh Inspektorat Daerah kepada perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan terhadap regulasi, sistem pengendalian intern, serta penerapan prinsip akuntabilitas.yang bertujuan :

a. Membantu perangkat daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan administrasi, dan potensi kerugian daerah;
c. Memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko;
d. Meningkatkan kualitas tata kelola, akuntabilitas kinerja, dan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

a. Mendampingi perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;
b. Pendampingan penerapan SPIP, manajemen risiko, dan zona integritas;
c. Pendampingan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (APIP/BPK/BPKP);
d. Asistensi teknis penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja (LKjIP, Renstra, Renja);
e. Asistensi dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa;
f. Asistensi penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja;
g. Asistensi penerapan aplikasi pengawasan, pelaporan, dan monitoring.

Output Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan:

a. Laporan hasil pendampingan dan asistensi;
b. Dokumen rekomendasi atau catatan hasil asistensi;
c. Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penerapan pengelolaan kinerja dan keuangan.

Indikator Kinerja Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan:

a. Jumlah perangkat daerah yang mendapat pendampingan/asistensi;
b. Jumlah laporan hasil pendampingan/asistensi yang disusun.

Manfaat Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan:

a. Meminimalisasi kesalahan administrasi dan potensi temuan pemeriksaan;
b. Meningkatkan kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi;
c. Memberikan solusi preventif agar permasalahan tidak berkembang menjadi temuan.

## Tabel 4.2 Rencana Program dan Pendanaan Inspektorat Daerah

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | | 21.752.038.687,00 | | 21.993.800.000,00 | | 22.321.600.000,00 | | 22.777.100.000,00 | | 23.311.300.000,00 | |
| 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 16.846.011.887,00 | | 17.033.200.000,00 | | 17.287.000.000,00 | | 17.639.700.000,00 | | 18.053.300.000,00 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 80,70 | 81,51 | 82,33 | 16.846.011.887,00 | 83,15 | 17.033.200.000,00 | 83,98 | 17.287.000.000,00 | 84,82 | 17.639.700.000,00 | 85,67 | 18.053.300.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | 3.768.725.600,00 | | 3.810.600.000,00 | | 3.867.400.000,00 | | 3.946.300.000,00 | | 4.038.900.000,00 | |
| Meningkatnya Prosentase Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK Secara Tuntas | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persen) | 90 | 90 | 91 | 3.768.725.600,00 | 91 | 3.810.600.000,00 | 92 | 3.867.400.000,00 | 92 | 3.946.300.000,00 | 93 | 4.038.900.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | 1.137.301.200,00 | | 1.150.000.000,00 | | 1.167.200.000,00 | | 1.191.100.000,00 | | 1.219.100.000,00 | |
| Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | Kenaikan Capaian Nilai Kapabilitas APIP (Nilai) | 3,000 | 3,050 | 3,100 | 1.137.301.200,00 | 3,150 | 1.150.000.000,00 | 3,200 | 1.167.200.000,00 | 3,250 | 1.191.100.000,00 | 3,300 | 1.219.100.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 21.752.038.687,00 | | 21.993.800.000,00 | | 22.321.600.000,00 | | 22.777.100.000,00 | | 23.311.300.000,00 | |

## 4.3 Uraian Indikator Kinerja Daerah

### Uraian Nilai SAKIP Pemda

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Daerah adalah skor atau tingkat capaian hasil evaluasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB terhadap kualitas penerapan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah. Nilai ini mencerminkan sejauh mana Pemda mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Tujuan Penilaian SAKIP :

a. Mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented government);
b. Menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan daerah;
c. Memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Komponen yang dinilai mengacu pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

a. Perencanaan Kinerja – Keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang SMART;
b. Pengukuran Kinerja – Mekanisme pengukuran kinerja dengan indikator yang tepat, relevan, dan terukur;
c. Pelaporan Kinerja – Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) yang sesuai dengan pedoman, lengkap, dan akuntabel;
d. Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Internal – Proses evaluasi mandiri maupun eksternal terhadap capaian kinerja dan tindak lanjut perbaikannya.

Capaian Kinerja – Hasil nyata pembangunan daerah yang diukur dari ketercapaian sasaran strategis.

### Uraian SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang bertujuan:

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Menjamin keandalan pelaporan keuangan dan kinerja;
c. Mengamankan aset daerah dari kehilangan, penyalahgunaan, atau kerusakan;
d. Mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
e. Menjadi bagian dari upaya mewujudkan good governance dan clean government.

Unsur SPIP antara lain:

a. Lingkungan Pengendalian – Penciptaan budaya pengendalian melalui integritas, etika, kompetensi SDM, serta struktur organisasi yang mendukung;
b. Penilaian Risiko – Identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi;
c. Kegiatan Pengendalian – Kebijakan dan prosedur untuk memastikan tindak lanjut atas hasil evaluasi dan mitigasi risiko;
d. Informasi dan Komunikasi – Penyediaan dan pemanfaatan informasi yang tepat waktu, akurat, serta mekanisme komunikasi yang efektif;
e. Pemantauan – Penilaian berkala atas efektivitas SPIP dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan.

Ruang Lingkup di Pemerintahan Daerah:

a. Penerapan SPIP terintegrasi dalam siklus manajemen pemerintahan: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
b. Penguatan pengendalian intern di perangkat daerah melalui pendampingan, asistensi, dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah;
c. Penilaian maturitas SPIP sebagai tolok ukur kemajuan penerapan.

Output SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah):

a. Dokumen penilaian risiko perangkat daerah;
b. Laporan penilaian maturitas SPIP;
c. Rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern.

Indikator Kinerja SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) :

a. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah (skala 1–5, dari Rintisan hingga Optimal);
b. Jumlah perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standar.

Manfaat SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah):

a. Menjadi alat manajemen untuk menjamin tercapainya sasaran strategis daerah;
b. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan;
c. Meminimalisasi risiko penyimpangan, kecurangan, serta potensi kerugian daerah;
d. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

**Uraian Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Survey Penilaian Integritas/SPI)**

Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Probolinggo diperoleh dari hasil Survey Penilaian Intergitas/SPI yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sekarang menjadi Indeks Integritas Nasional (IIN). Indeks Integritas Nasional (IIN) merupakan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK yang diperoleh dari hasil SPI seluruh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah. SPI adalah instrumen nasional untuk mengukur risiko dan potensi terjadinya korupsi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Tujuan SPI adalah :

Mengukur tingkat / risiko korupsi di suatu instansi berdasarkan perspektif responden internal, eksternal dan eksper. SPI juga diselenggarakan untuk memberikan rekomendasi atas hal-hal pokok yang mesti dilakukan guna meningkatkan integritas organisasi.

Manfaat SPI :

Survey Penilaian Integritas (SPI) dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kesesuaian ekspektasi dan persepsi masyarakat dengan upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dengan korupsi di instansi tersebut. Melalui perbandingan ini, masyarakat dapat turut serta dalam pemberantasan korupsi di instansi. Jika semua pihak dapat bersama-sama melihat hasil survei yang terukur, perbaikan pemberantasan korupsi di lembaga dapat diperkuat sehingga kebijakan yang diambil pemerintah akan makin dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selanjutnya, pelayanan publik yang diterima masyarakat juga akan makin bebas dari korupsi.

## TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat | | | | | | | | | | |
| I | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai SAKIP | Nilai | 67,11 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | |
| 2 | Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Probolinggo | Indeks | 71,65 | 72,85 | 74,05 | 75,25 | 76,45 | 77,65 | 78,85 | |
| II | INDIKATOR KINERJA KUNCI | | | | | | | | | |
| 1 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai | 3,117 | 3,137 | 3,157 | 3,177 | 3,197 | 3,217 | 3,237 | |
| 2 | Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Nilai | 3 | 3,01 | 3,02 | 3,03 | 3,04 | 3,05 | 3,06 | |

## 4.4 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam penyusunan Renstra 2025 – 2029 menggunakan 3 Program, 11 Kegiatan dan 43 Subkegiatan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang diuraikan pada tabel berikut :

## Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan Inspektorat Daerah

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PD | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | 21.752.038.687,00 | | 21.993.800.000,00 | | 22.321.600.000,00 | | 22.777.100.000,00 | | 23.311.300.000,00 | | |
| 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 16.846.011.887,00 | | 17.033.200.000,00 | | 17.287.000.000,00 | | 17.639.700.000,00 | | 18.053.300.000,00 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD | 80,70 | 82,33 | 16.846.011.887,00 | 83,15 | 17.033.200.000,00 | 83,98 | 17.287.000.000,00 | 84,82 | 17.639.700.000,00 | 85,67 | 18.053.300.000,00 | 6.01.0 .00.0. 00.01. 00 00 - Inspe ktorat | |
| 6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 140.772.450,00 | | 140.772.450,00 | | 140.772.450,00 | | 140.772.450,00 | | 140.772.450,00 | | |
| Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 | 6 | 140.772.450,00 | 6 | 140.772.450,00 | 6 | 140.772.450,00 | 6 | 140.772.450,00 | 6 | 140.772.450,00 | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 68.744.550,00 | | 68.744.550,00 | | 68.744.550,00 | | 68.744.550,00 | | 68.744.550,00 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 | 6 | 68.744.550,00 | 6 | 68.744.550,00 | 6 | 68.744.550,00 | 6 | 68.744.550,00 | 6 | 68.744.550,00 | | |
| 6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | 43.866.900,00 | | 43.866.900,00 | | 43.866.900,00 | | 43.866.900,00 | | 43.866.900,00 | | |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 | 3 | 43.866.900,00 | 3 | 43.866.900,00 | 3 | 43.866.900,00 | 3 | 43.866.900,00 | 3 | 43.866.900,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PD | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 28.161.000,00 | | 28.161.000,00 | | 28.161.000,00 | | 28.161.000,00 | | 28.161.000,00 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 | 4 | 28.161.000,00 | 4 | 28.161.000,00 | 4 | 28.161.000,00 | 4 | 28.161.000,00 | 4 | 28.161.000,00 | | |
| 6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 10.561.436.170,00 | | 10.561.436.169,00 | | 10.561.436.169,00 | | 10.820.000.000,00 | | 10.950.000.000,00 | | |
| Meningkatnya dokumen administrasi keuangan tersusun | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 58 | 78 | 10.561.436.170,00 | 83 | 10.561.436.169,00 | 88 | 10.561.436.169,00 | 93 | 10.820.000.000,00 | 98 | 10.950.000.000,00 | | |
| 6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 10.561.436.170,00 | | 10.561.436.169,00 | | 10.561.436.169,00 | | 10.820.000.000,00 | | 10.950.000.000,00 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 58 | 78 | 10.561.436.170,00 | 83 | 10.561.436.169,00 | 88 | 10.561.436.169,00 | 93 | 10.820.000.000,00 | 98 | 10.950.000.000,00 | | |
| 6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 1.854.110.700,00 | | 1.856.816.235,00 | | 1.856.816.235,00 | | 1.856.816.235,00 | | 1.856.816.235,00 | | |
| Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah terlaksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 | 4 | 1.854.110.700,00 | 4 | 1.856.816.235,00 | 4 | 1.856.816.235,00 | 4 | 1.856.816.235,00 | 4 | 1.856.816.235,00 | | |
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 | 80 | | 90 | | 95 | | 100 | | 105 | | | |
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 | 80 | | 90 | | 95 | | 100 | | 105 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PD | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 | 80 | 300.000.000,00 | 90 | 300.000.000,00 | 95 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | 105 | 300.000.000,00 | | |
| 6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 30.170.700,00 | | 31.679.235,00 | | 31.679.235,00 | | 31.679.235,00 | | 31.679.235,00 | | |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 | 12 | 30.170.700,00 | 12 | 31.679.235,00 | 12 | 31.679.235,00 | 12 | 31.679.235,00 | 12 | 31.679.235,00 | | |
| 6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 23.940.000,00 | | 25.137.000,00 | | 25.137.000,00 | | 25.137.000,00 | | 25.137.000,00 | | |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 | 4 | 23.940.000,00 | 4 | 25.137.000,00 | 4 | 25.137.000,00 | 4 | 25.137.000,00 | 4 | 25.137.000,00 | | |
| 6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 | 80 | 1.500.000.000,00 | 90 | 1.500.000.000,00 | 95 | 1.500.000.000,00 | 100 | 1.500.000.000,00 | 105 | 1.500.000.000,00 | | |
| 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 854.081.032,00 | | 854.081.032,00 | | 854.081.032,00 | | 854.081.032,00 | | 854.081.032,00 | | |
| Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah terlaksana | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 854.081.032,00 | 12 | 854.081.032,00 | 12 | 854.081.032,00 | 12 | 854.081.032,00 | 12 | 854.081.032,00 | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PD | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 10.500.000,00 | 12 | 10.500.000,00 | 12 | 10.500.000,00 | 12 | 10.500.000,00 | 12 | 10.500.000,00 | | |
| 6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 150.000.000,00 | 12 | 150.000.000,00 | 12 | 150.000.000,00 | 12 | 150.000.000,00 | 12 | 150.000.000,00 | | |
| 6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 25.270.245,00 | | 25.270.245,00 | | 25.270.245,00 | | 25.270.245,00 | | 25.270.245,00 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 | 12 | 25.270.245,00 | 12 | 25.270.245,00 | 12 | 25.270.245,00 | 12 | 25.270.245,00 | 12 | 25.270.245,00 | | |
| 6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 52.086.287,00 | | 52.086.287,00 | | 52.086.287,00 | | 52.086.287,00 | | 52.086.287,00 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 52.086.287,00 | 12 | 52.086.287,00 | 12 | 52.086.287,00 | 12 | 52.086.287,00 | 12 | 52.086.287,00 | | |
| 6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 52.500.000,00 | | 52.500.000,00 | | 52.500.000,00 | | 52.500.000,00 | | 52.500.000,00 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | 12 | 52.500.000,00 | 12 | 52.500.000,00 | 12 | 52.500.000,00 | 12 | 52.500.000,00 | 12 | 52.500.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PD | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 16.800.000,00 | | 16.800.000,00 | | 16.800.000,00 | | 16.800.000,00 | | 16.800.000,00 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | 12 | 16.800.000,00 | 12 | 16.800.000,00 | 12 | 16.800.000,00 | 12 | 16.800.000,00 | 12 | 16.800.000,00 | | |
| 6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 46.924.500,00 | | 46.924.500,00 | | 46.924.500,00 | | 46.924.500,00 | | 46.924.500,00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 12 | 46.924.500,00 | 12 | 46.924.500,00 | 12 | 46.924.500,00 | 12 | 46.924.500,00 | 12 | 46.924.500,00 | | |
| 6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 12 | 500.000.000,00 | 12 | 500.000.000,00 | 12 | 500.000.000,00 | 12 | 500.000.000,00 | 12 | 500.000.000,00 | | |
| 6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 1.815.836.260,00 | | 2.000.318.839,00 | | 2.254.118.839,00 | | 2.290.255.008,00 | | 2.573.855.008,00 | | |
| Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 0 | 1 | 1.815.836.260,00 | 1 | 2.000.318.839,00 | 1 | 2.254.118.839,00 | 1 | 2.290.255.008,00 | 1 | 2.573.855.008,00 | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 30 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | | |
| | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | 45 | | | |
| 6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PD | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 | 1 | 500.000.000,00 | 1 | 500.000.000,00 | 1 | 500.000.000,00 | 1 | 500.000.000,00 | 1 | 500.000.000,00 | | |
| 6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 250.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 30 | 20 | 250.000.000,00 | 25 | 150.000.000,00 | 30 | 150.000.000,00 | 35 | 150.000.000,00 | 40 | 150.000.000,00 | | |
| 6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 987.086.260,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 | 25 | 987.086.260,00 | 30 | 500.000.000,00 | 35 | 500.000.000,00 | 40 | 500.000.000,00 | 45 | 500.000.000,00 | | |
| 6.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 78.750.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 0 | 1 | 78.750.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | | |
| 6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | - | | 800.318.839,00 | | 1.054.118.839,00 | | 1.090.255.008,00 | | 1.373.855.008,00 | | |
| Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 1 | - | 1 | 800.318.839,00 | 1 | 1.054.118.839,00 | 1 | 1.090.255.008,00 | 1 | 1.373.855.008,00 | | |
| 6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 912.455.900,00 | | 912.455.900,00 | | 912.455.900,00 | | 912.455.900,00 | | 912.455.900,00 | | |
| Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 912.455.900,00 | 12 | 912.455.900,00 | 12 | 912.455.900,00 | 12 | 912.455.900,00 | 12 | 912.455.900,00 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 262.455.900,00 | | 262.455.900,00 | | 262.455.900,00 | | 262.455.900,00 | | 262.455.900,00 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 262.455.900,00 | 12 | 262.455.900,00 | 12 | 262.455.900,00 | 12 | 262.455.900,00 | 12 | 262.455.900,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PD | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 650.000.000,00 | | 650.000.000,00 | | 650.000.000,00 | | 650.000.000,00 | | 650.000.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 650.000.000,00 | 12 | 650.000.000,00 | 12 | 650.000.000,00 | 12 | 650.000.000,00 | 12 | 650.000.000,00 | | |
| 6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 707.319.375,00 | | 707.319.375,00 | | 707.319.375,00 | | 765.319.375,00 | | 765.319.375,00 | | |
| Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 | 20 | 707.319.375,00 | 20 | 707.319.375,00 | 20 | 707.319.375,00 | 20 | 765.319.375,00 | 20 | 765.319.375,00 | | |
| | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| 6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 274.163.400,00 | | 274.163.400,00 | | 274.163.400,00 | | 274.163.400,00 | | 274.163.400,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 | 10 | 274.163.400,00 | 10 | 274.163.400,00 | 10 | 274.163.400,00 | 10 | 274.163.400,00 | 10 | 274.163.400,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PD | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 90.711.600,00 | | 90.711.600,00 | | 90.711.600,00 | | 90.711.600,00 | | 90.711.600,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 | 15 | 90.711.600,00 | 15 | 90.711.600,00 | 15 | 90.711.600,00 | 15 | 90.711.600,00 | 15 | 90.711.600,00 | | |
| 6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 58.944.375,00 | | 58.944.375,00 | | 58.944.375,00 | | 58.944.375,00 | | 58.944.375,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 | 20 | 58.944.375,00 | 20 | 58.944.375,00 | 20 | 58.944.375,00 | 20 | 58.944.375,00 | 20 | 58.944.375,00 | | |
| 6.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 42.000.000,00 | | 42.000.000,00 | | 42.000.000,00 | | 42.000.000,00 | | 42.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 | 1 | 42.000.000,00 | 1 | 42.000.000,00 | 1 | 42.000.000,00 | 1 | 42.000.000,00 | 1 | 42.000.000,00 | | |
| 6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 241.500.000,00 | | 241.500.000,00 | | 241.500.000,00 | | 299.500.000,00 | | 299.500.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 1 | 241.500.000,00 | 1 | 241.500.000,00 | 1 | 241.500.000,00 | 1 | 299.500.000,00 | 1 | 299.500.000,00 | | |
| 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | 3.768.725.600,00 | | 3.810.600.000,00 | | 3.867.400.000,00 | | 3.946.300.000,00 | | 4.038.900.000,00 | | |
| Meningkatnya Prosentase Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK Secara Tuntas | | | | 3.768.725.600,00 | | 3.810.600.000,00 | | 3.867.400.000,00 | | 3.946.300.000,00 | | 4.038.900.000,00 | 6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat | |
| 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | 3.146.725.600,00 | | 3.166.725.600,00 | | 3.223.525.600,00 | | 3.271.300.000,00 | | 3.358.025.600,00 | | |
| Pencegahan dan Deteksi Penyimpangan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 5 | 4 | 3.146.725.600,00 | 4 | 3.166.725.600,00 | 4 | 3.223.525.600,00 | 4 | 3.271.300.000,00 | 4 | 3.358.025.600,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PD | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 20 | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 5 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 5 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 5 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 320.000.000,00 | | 320.000.000,00 | | 320.000.000,00 | | 330.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 5 | 20 | 320.000.000,00 | 20 | 320.000.000,00 | 20 | 320.000.000,00 | 20 | 330.000.000,00 | 20 | 350.000.000,00 | | |
| 6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 1.200.000.000,00 | | 1.200.000.000,00 | | 1.225.000.000,00 | | 1.242.774.400,00 | | 1.260.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 5 | 30 | 1.200.000.000,00 | 30 | 1.200.000.000,00 | 30 | 1.225.000.000,00 | 30 | 1.242.774.400,00 | 30 | 1.260.000.000,00 | | |
| 6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja | | | | 302.670.900,00 | | 302.670.900,00 | | 303.025.600,00 | | 303.025.600,00 | | 303.025.600,00 | | |
| Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 5 | 6 | 302.670.900,00 | 6 | 302.670.900,00 | 6 | 303.025.600,00 | 6 | 303.025.600,00 | 6 | 303.025.600,00 | | |
| 6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan | | | | 115.500.000,00 | | 115.500.000,00 | | 115.500.000,00 | | 115.500.000,00 | | 125.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 5 | 5 | 115.500.000,00 | 5 | 115.500.000,00 | 5 | 115.500.000,00 | 5 | 115.500.000,00 | 5 | 125.000.000,00 | | |
| 6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa | | | | 650.000.000,00 | | 670.000.000,00 | | 685.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 730.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 20 | 120 | 650.000.000,00 | 120 | 670.000.000,00 | 120 | 685.000.000,00 | 120 | 700.000.000,00 | 120 | 730.000.000,00 | | |
| 6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 260.000.000,00 | | 260.000.000,00 | | 260.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PD | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 2 | 2 | 250.000.000,00 | 2 | 250.000.000,00 | 2 | 260.000.000,00 | 2 | 260.000.000,00 | 2 | 260.000.000,00 | | |
| 6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | 308.554.700,00 | | 308.554.700,00 | | 315.000.000,00 | | 320.000.000,00 | | 330.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 5 | 4 | 308.554.700,00 | 4 | 308.554.700,00 | 4 | 315.000.000,00 | 4 | 320.000.000,00 | 4 | 330.000.000,00 | | |
| 6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | 622.000.000,00 | | 643.874.400,00 | | 643.874.400,00 | | 675.000.000,00 | | 680.874.400,00 | | |
| Terwujudnya perbaikan tata kelola, pengelolaan keuangan, dan peningkatan kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 4 | 4 | 622.000.000,00 | 4 | 643.874.400,00 | 4 | 643.874.400,00 | 4 | 675.000.000,00 | 4 | 680.874.400,00 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 15 | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | | |
| 6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | 22.000.000,00 | | 23.874.400,00 | | 23.874.400,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | |
| Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 4 | 4 | 22.000.000,00 | 4 | 23.874.400,00 | 4 | 23.874.400,00 | 4 | 25.000.000,00 | 4 | 25.000.000,00 | | |
| 6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | 600.000.000,00 | | 620.000.000,00 | | 620.000.000,00 | | 650.000.000,00 | | 655.874.400,00 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 15 | 36 | 600.000.000,00 | 36 | 620.000.000,00 | 36 | 620.000.000,00 | 36 | 650.000.000,00 | 36 | 655.874.400,00 | | |
| 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | 1.137.301.200,00 | | 1.150.000.000,00 | | 1.167.200.000,00 | | 1.191.100.000,00 | | 1.219.100.000,00 | | |
| Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | Kenaikan Capaian Nilai Kapabilitas APIP | 3,000 | 3,100 | 1.137.301.200,00 | 3,150 | 1.150.000.000,00 | 3,200 | 1.167.200.000,00 | 3,250 | 1.191.100.000,00 | 3,300 | 1.219.100.000,00 | 6.01.0 .00.0. 00.01. 00 00 - Inspe ktorat | |
| 6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | 134.910.950,00 | | 135.000.000,00 | | 135.000.000,00 | | 151.100.000,00 | | 151.100.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PD | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 5 | 5 | 134.910.950,00 | 5 | 135.000.000,00 | 5 | 135.000.000,00 | 5 | 151.100.000,00 | 5 | 151.100.000,00 | | |
| | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | 52.500.000,00 | | 52.589.050,00 | | 52.589.050,00 | | 68.689.050,00 | | 68.689.050,00 | | |
| Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 5 | 5 | 52.500.000,00 | 5 | 52.589.050,00 | 5 | 52.589.050,00 | 5 | 68.689.050,00 | 5 | 68.689.050,00 | | |
| 6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | 82.410.950,00 | | 82.410.950,00 | | 82.410.950,00 | | 82.410.950,00 | | 82.410.950,00 | | |
| Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 5 | 5 | 82.410.950,00 | 5 | 82.410.950,00 | 5 | 82.410.950,00 | 5 | 82.410.950,00 | 5 | 82.410.950,00 | | |
| 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi | | | | 1.002.390.250,00 | | 1.015.000.000,00 | | 1.032.200.000,00 | | 1.040.000.000,00 | | 1.068.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi Kepada Perangkat Daerah Yang Telah Dilakukan | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 5 | 12 | 1.002.390.250,00 | 12 | 1.015.000.000,00 | 12 | 1.032.200.000,00 | 12 | 1.040.000.000,00 | 12 | 1.068.000.000,00 | | |
| | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 10 | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | | | |
| | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 10 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, | 52 | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PD | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 137.744.250,00 | | 140.000.000,00 | | 145.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 164.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 10 | 52 | 137.744.250,00 | 52 | 140.000.000,00 | 52 | 145.000.000,00 | 52 | 150.000.000,00 | 52 | 164.000.000,00 | | |
| 6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 10 | 25 | 325.000.000,00 | 25 | 325.000.000,00 | 25 | 325.000.000,00 | 25 | 325.000.000,00 | 25 | 325.000.000,00 | | |
| 6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | 300.000.000,00 | | 310.000.000,00 | | 310.000.000,00 | | 310.000.000,00 | | 319.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 5 | 12 | 300.000.000,00 | 12 | 310.000.000,00 | 12 | 310.000.000,00 | 12 | 310.000.000,00 | 12 | 319.000.000,00 | | |
| 6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | 239.646.000,00 | | 240.000.000,00 | | 252.200.000,00 | | 255.000.000,00 | | 260.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 52 | 52 | 239.646.000,00 | 52 | 240.000.000,00 | 52 | 252.200.000,00 | 52 | 255.000.000,00 | 52 | 260.000.000,00 | | |

## 4.5 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Semua Subkegiatan yang ada pada Tabel 4.4 medukung Program Prioritas Pembangunan Daerah namun secara spesifik tergambarkan dalam beberapa Aktivitas kegiatan dibeberapa Subkegiatan utama dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Probolinggo Bebas Korupsi

   Prioritas ini diarahkan untuk mencegah dan memberantas praktik KKN serta memperkuat integritas birokrasi. Subkegiatan pendukung:

   Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

   → memastikan upaya pencegahan korupsi berjalan efektif di perangkat daerah.

   Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas

   → membangun budaya kerja berintegritas dan memperkuat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

   Pengawasan dengan Tujuan Tertentu & Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

   → pemeriksaan khusus untuk kasus tertentu dan percepatan penyelesaian kerugian negara/daerah.

   Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK & APIP

   → memastikan rekomendasi hasil audit benar-benar ditindaklanjuti.

   Outcome: berkurangnya potensi KKN, meningkatnya integritas ASN, dan tumbuhnya kepercayaan publik.

2. SAE Law Care

   (SAE: Smart, Accountable, Excellent – berorientasi pada tata kelola yang taat hukum)

   Subkegiatan pendukung:

   Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan & Fasilitasi Pengawasan

   → penyusunan pedoman, SOP, dan kebijakan pengawasan yang lebih responsif terhadap isu hukum dan tata kelola.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

→ mendampingi perangkat daerah agar taat hukum, tertib administrasi, dan sesuai regulasi.

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

→ memastikan perangkat daerah melaksanakan reformasi birokrasi dengan prinsip kepatuhan hukum dan akuntabilitas.

Pengawasan Kinerja, Keuangan, dan Desa

→ pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program/kegiatan agar sesuai hukum, efektif, dan transparan.

Outcome: meningkatnya kepatuhan hukum, tertib administrasi, dan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih serta berorientasi pelayanan publik.

## Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000 – Inspektorat** | | | | |
| 1, | 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Meningkatnya Prosentase Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK Secara Tuntas | 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal | |
| | | | 6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | |
| | | | 6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | |
| | | | 6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja | |
| | | | 6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan | |
| | | | 6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa | |
| | | | 6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal | |
| | | | 6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | |
| | | | 6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | |
| | | | 6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | |
| | | | 6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | |
| 2, | 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | 6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | |
| | | | 6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | |
| | | | 6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | |
| | | | 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| | | | 6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | 6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | |
| | | | 6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | |
| | | | 6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | |

## 4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah

Indikator Sasaran Renstra Inspektorat Daerah dijadikan Indikikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang dijabarkan sebagai berikut :

- Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Baseline 2024: 2,788

Target 2025: 2,807 → naik bertahap hingga 3,00 pada 2030.

Makna: MRI mengukur kemampuan Pemda dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko penyelenggaraan pemerintahan.

Target Keberhasilan: Pemerintah Kabupaten Probolinggo memiliki sistem manajemen risiko yang lebih matang, sehingga potensi penyimpangan, kegagalan program, dan kerugian keuangan dapat dicegah sejak dini.

- Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

Baseline 2024: 3,000

Target 2025: 3,013 → naik bertahap hingga 3,06 pada 2030.

Makna: Kapabilitas APIP menggambarkan tingkat kemampuan Inspektorat sebagai internal auditor (berdasarkan model IA-CM).

Target Keberhasilan: Inspektorat Daerah berada pada Level 3 (Integrated) menuju Level 4 (Managed), sehingga berperan bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga mitra strategis dalam tata kelola pemerintahan.

- Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Baseline 2024: 71,65

Target 2025: 72,85 → naik bertahap hingga 78,85 pada 2030.

Makna: Indeks integritas mengukur persepsi dan praktik integritas birokrasi, terutama dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.

Target Keberhasilan: Terbangunnya budaya kerja birokrasi yang bersih, transparan, bebas dari KKN, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

- Nilai SAKIP – Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Baseline 2024: 13,65

Target 2025: 17,63 → naik bertahap hingga 18,25 pada 2030.

Makna: Indikator ini menilai kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang difasilitasi Inspektorat.

Target Keberhasilan: Akuntabilitas Kinerja Pemkab Probolinggo meningkat secara signifikan, ditunjukkan dengan perbaikan Nilai SAKIP, sehingga anggaran daerah semakin berorientasi pada hasil (result oriented government).

**Kesimpulan Arah Pencapaian IKU**

MRI → Pencegahan risiko pemerintahan semakin kuat.

Kapabilitas APIP → Inspektorat naik kelas menjadi strategic partner.

Indeks Integritas → Birokrasi makin bersih dan berintegritas.

Nilai SAKIP → Akuntabilitas kinerja Pemda meningkat konsisten.

## TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA
## RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 1. | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat | | | | | | | | | |
| 2. | Manajemen Risiko Indeks (MRI) | Indeks | 2,788 | 2,807 | 2,847 | 2,885 | 2,923 | 2,96 | 3 | |
| 3. | Kenaikan Capaian Nilai Kapabilitas APIP | Nilai | 3 | 3,01 | 3,02 | 3,03 | 3,04 | 3,05 | 3,06 | |
| 4. | Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Probolinggo | Indeks | 71,65 | 72,85 | 74,05 | 75,25 | 76,45 | 77,65 | 78,85 | |
| 5. | Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Nilai | 13,65 | 17,63 | 17,75 | 17,87 | 18 | 18,125 | 18,25 | |

## 4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan regulasi tersebut dan pedoman evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, IKK Inspektorat biasanya meliputi:

Kapabilitas APIP

Definisi: Tingkat kemampuan dan peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan intern, diukur berdasarkan model Internal Audit Capability Model (IA-CM).

Satuan: Level (1–5).

Relevansi di LPPD: Menjadi indikator utama tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance).

Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Definisi: Tingkat kematangan penerapan sistem pengendalian intern di Pemda.

Satuan: Level (1–5).

Relevansi di LPPD: Menggambarkan sejauh mana Pemda mampu mengelola risiko, menjaga aset, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

## TABEL 4.7 INDIKATOR KINERJA KUNCI
## RANCANGAN AKHIR RENSTRA
## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | |
| 2. | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | positif | Nilai | 3,117 | 3,137 | 3,157 | 3,177 | 3,197 | 3,217 | 3,237 | |
| 3. | Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | positif | Nilai | 3.000 | 3.010 | 3.020 | 3.030 | 3.040 | 3.050 | 3.060 | |

# BAB V

# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Inspektorat Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo.

# RENCANA STRATEGIS

# ( RENSTRA )

# KECAMATAN BANTARAN

# TAHUN 2025-2029

**KECAMATAN BANTARAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantaran Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Bantaran Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Bantaran. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bantaran. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Bantaran dengan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.

Bantaran, Agustus 2025

CAMAT BANTARAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN BANTARAN

**JUNAEDI, S.Sos. M.SI**
Pembina Tingkat I
NIP. 196906271990031004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 6
1.4 Sistematika Penulisan ..... 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantaran ..... 10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Bantaran ..... 17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantaran ..... 21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 27
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Bantaran .... 27
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Bantaran ..... 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bantaran Tahun 2025-2029 ..... 32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bantaran dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 40
4.1 Uraian Program ..... 40
4.2 Uraian Kegiatan ..... 44
BAB V PENUTUP ..... 79
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 79
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 80

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..…….…..… 18
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ……..…… 19
Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..….. 19
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ……. 22
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo (2020-2024) …… 23
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Bantaran ……..… 30
Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 …….. 35
Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Bantaran …… 36
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Bantaran ……..... 38
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Bantaran …… 33
Tabel 4.1 Program Kecamatan Bantaran ……. 42
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bantaran ……. 45
Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Bantaran …….. 58
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bantaran ……. 61
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… 77
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantaran …….. 78
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Bantaran …… 78

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bantaran ..... 17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo ..... 33
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah ..... 34
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bantaran ..... 45

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Bantaran menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantaran setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Bantaran juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Bantaran. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Bantaran berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Bantaran terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantaran yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Bantaran untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Bantaran berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Bantaran dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Bantaran disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Bantaran akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Bantaran dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Bantaran untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Bantaran berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan

Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta Pembangunan wilayah melalui Perencanaan yang sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANTARAN**

Bab II memuat :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantaran
2.2 Sumber Daya Kecamatan Bantaran
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantaran
2.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Bantaran
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bantaran

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bantaran Tahun 2025-2029
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bantaran dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bantaran 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantaran; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantaran

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Bantaran Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana,

pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
   b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
   c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan

keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;

d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi

pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Bantaran**

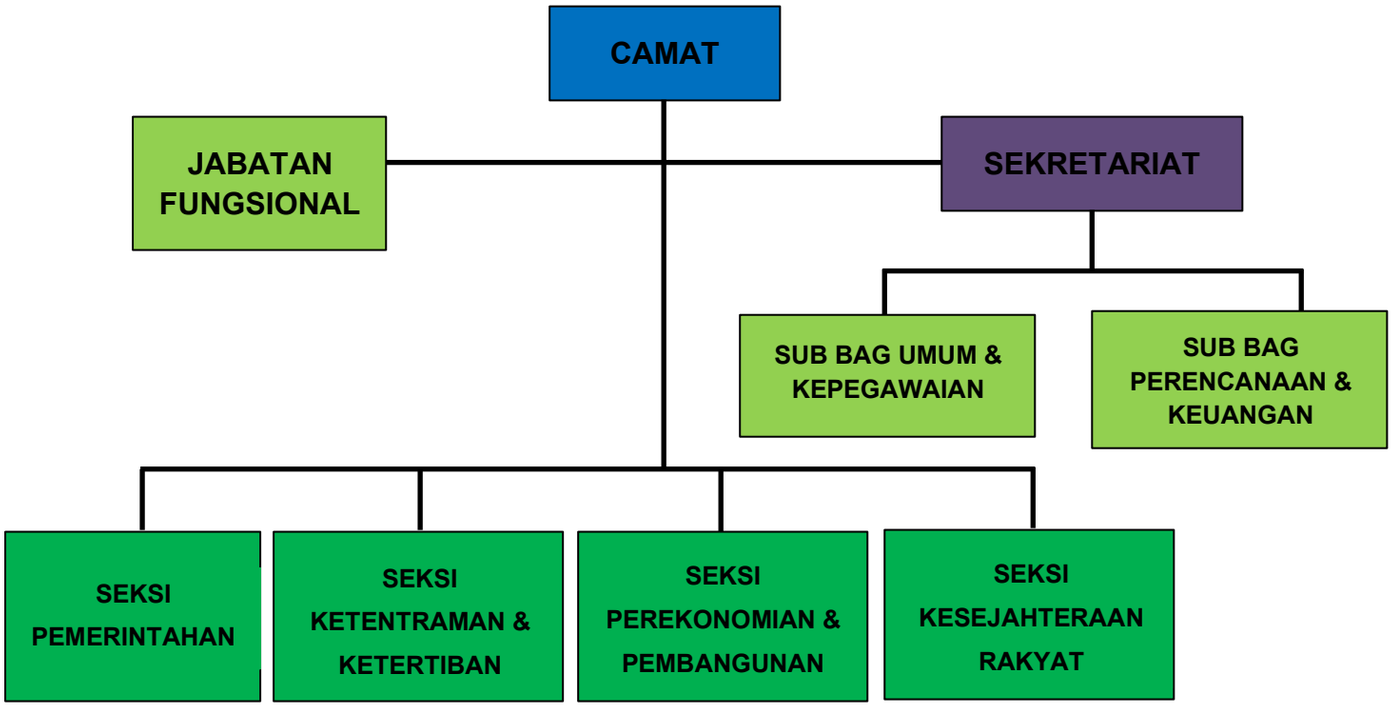


Struktur Organisasi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bantaran

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Bantaran.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Bantaran sebanyak 23 orang dengan rincian : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 15 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 3 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 5 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Bantaran berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | **2** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | **2** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | **2** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | **2** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 10. | Honorer | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | **6** |
| **Jumlah** | | **0** | **1** | **10** | **0** | **10** | **2** | **19** | **4** | **20** |

***Sumber Data : Kecamatan Bantaran***

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | **18** | 1 | 5 | 6 | 6 | **18** |
| 2. | Perempuan | - | 1 | - | 1 | - | 0 | **2** | - | 1 | 1 | 0 | **2** |
| **Jumlah** | | **-** | **3** | **5** | **4** | **2** | **6** | **20** | **0** | **6** | **13** | **6** | **20** |

***Sumber Data : Kecamatan Bantaran***

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.3**

**Jumlah Sarana Prasarana**

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak Berat (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lain-lain Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Lain-lain tugu/tanda batas | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Portable Generating Set | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Genset | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kursi Kerja | 17 | 16 | 1 |
| 11 | Kursi Lipat | 15 | 13 | 2 |
| 12 | P.C Unit | 11 | 7 | 4 |
| 13 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 19 | 18 | 1 |
| 14 | Sepeda Motor | 10 | 7 | 3 |
| 15 | Sport Utility Vehicle (SUV) | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Mesin Fotocopy Double Folio | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Lemari Besi/Metal | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Lemari Kayu | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Filing Cabinet Besi | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Brandkas | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Lemari Kaca | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Alat Penghancur Kertas | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Mesin Absensi | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Papan Pengumuman | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Meja Kerja Kayu | 7 | 7 | 0 |
| 26 | Kursi Besi/Metal | 70 | 70 | 0 |
| 27 | Meja Rapat | 4 | 4 | 0 |
| 28 | Meja Resepsionis | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Meja 1/2 Biro | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Kasur/Spring Bed | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Kursi Rapat | 42 | 42 | 0 |
| 32 | Kursi Tamu | 4 | 4 | 0 |
| 33 | Bangku Tunggu | 2 | 2 | 0 |
| 34 | Filling Besi/Metal | 2 | 2 | 0 |
| 35 | Lemari Es | 1 | 1 | 0 |
| 36 | A.C. Window | 3 | 3 | 0 |
| 37 | A.C. Split | 2 | 2 | 0 |
| 38 | A.C. Unit | 2 | 2 | 0 |
| 39 | Kipas Angin | 5 | 5 | 0 |
| 40 | Televisi | 6 | 6 | 0 |
| 41 | Sound System | 2 | 2 | 0 |
| 42 | Dispenser | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Mimbar/Podium | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Karpet | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Gordyin/Kray | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Mesin Pompa Air | 2 | 2 | 0 |
| 47 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Meja Tamu Biasa | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 5 | 5 | 0 |
| 52 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Camera Electronic | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Layar Film/Projector | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Wireless Amplifier | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Antene SHF Portable | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Termometer Mercury Untuk Suhu Badan | 3 | 3 | 0 |
| 58 | Lap Top | 13 | 13 | 0 |
| 59 | Note Book | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 1 | 1 | 0 |
| 61 | External/ Portable Hardisk | 3 | 3 | 0 |
| 62 | Hard disk Eksternal | 7 | 7 | 0 |
| 65 | Monitor | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 1 | 0 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Lain-lain Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Jam Elektronik | 6 | 0 | 6 |
| 70 | Gambar Presiden | 2 | 0 | 2 |
| 71 | Facsimile | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Bibliografi, Katalog | 1 | 1 | 0 |

***Sumber Data : Kecamatan Bantaran***

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantaran

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantaran yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Bantaran telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Bantaran dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

Target dan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 86,55 | 92,44 | 97,66 | - | - | 86,55 | 92,44 | 97,66 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 95,92 | 96,84 | 98,85 | - | - | 95,92 | 96,84 | 98,85 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 86,61 | 99,86 | 93,37 | - | - | 86,61 | 99,86 | 93,37 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | - | - | - | - | 98,75 | | | - | - | 95,71 | - | - | - | - | 96,92 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | - | - | 80 | 80 | 74 | | | 67,56 | 68,51 | 71,36 | - | - | 84,45 | 85,64 | 96,43 |

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut :

## Tabel 2.3.2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | **2.691.649.012,00** | **2.449.870.469,99** | **2.762.460.169,00** | - | - | **2.485.870.376,00** | **2.303.809.643,00** | **2.273.797.426,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **92,35** | **94,04** | **82,31** | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.839.400,00 | 830.000,00 | - | - | - | 7.230.000,00 | 810.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 92,23 | 97,59 | #DIV/0! | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | 5.260.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | 5.230.000,00 | 30.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,43 | 100,00 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | | 430.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - | 390.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 97,50 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | | 430.000,00 | - | - | - | - | 400.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,02 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | | 430.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | 400.000,00 | 390.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,02 | 97,50 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | | 430.000,00 | - | - | - | - | 400.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,02 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | | 430.000,00 | - | - | - | - | 400.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,02 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | 429.400,00 | - | - | - | - | 400.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,15 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.416.844.012,00 | 2.228.385.303,00 | 2.461.918.000,00 | - | - | 2.227.172.073,00 | 2.088.229.922,00 | 1.982.824.512,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92,15 | 93,71 | 80,54 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | | 2.265.486.000,00 | 2.068.041.758,00 | 2.449.087.000,00 | | | 2.078.284.877,00 | 1.928.705.006,00 | 1.970.004.512,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91,74 | 93,26 | 80,44 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | | 150.438.012,00 | 160.343.545,00 | 12.400.000,00 | | | 148.487.196,00 | 159.524.916,00 | 12.400.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,70 | 99,49 | 100,00 | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | | - | - | - | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | 460.000,00 | - | 431.000,00 | | | 400.000,00 | | 420.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86,96 | #DIV/0! | 97,45 | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | | 460.000,00 | - | - | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | | - | - | - | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | | - | - | - | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | - | - | 400.000,00 | - | - | - | - | 390.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,50 | | |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | 400.000,00 | | | | | 390.000,00 | | | | | | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 168.384.060,00 | 44.133.216,99 | 76.781.310,64 | - | - | 163.851.239,00 | 43.764.950,00 | 72.870.950,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,31 | 99,17 | 94,91 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | | 2.718.500,00 | 2.493.000,00 | 4.446.000,00 | | | 2.718.200,00 | 2.493.000,00 | 4.405.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,99 | 100,00 | 99,09 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | | 60.494.400,00 | 12.549.000,00 | 10.564.500,00 | | | 60.038.100,00 | 12.494.650,00 | 10.302.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,25 | 99,57 | 97,52 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | | 1.614.100,00 | 2.391.500,00 | 4.019.200,00 | | | 1.614.100,00 | 2.387.300,00 | 3.946.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 99,82 | 98,19 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | | 18.600.160,00 | 24.000.000,00 | 23.999.999,90 | | | 18.055.607,00 | 23.750.000,00 | 21.178.950,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,07 | 98,96 | 88,25 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | | 2.960.300,00 | 2.699.716,99 | 1.381.610,74 | | | 1.344.000,00 | 2.640.000,00 | 1.216.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 45,40 | 97,79 | 88,01 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | | 2.889.600,00 | - | - | | | 2.700.000,00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,44 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | | 79.107.000,00 | - | 32.370.000,00 | | | 77.381.232,00 | | 31.821.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,82 | #DIV/0! | 98,31 | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | 68.659.000,00 | 45.304.000,00 | - | - | - | 68.575.000,00 | 45.150.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,88 | 99,66 | | |
| Pengadaan Mebel | | | | - | 2.850.000,00 | | | | | 2.825.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,12 | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 68.659.000,00 | 42.454.000,00 | | | | 68.575.000,00 | 42.325.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,88 | 99,70 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 94.181.540,00 | 95.362.950,00 | 174.456.858,36 | - | - | 85.153.064,00 | 91.134.971,00 | 169.978.164,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90,41 | 95,57 | 97,43 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | | 1.199.900,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | 1.199.900,00 | 990.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 99,00 | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | | 32.581.640,00 | 27.962.950,00 | 49.772.550,36 | | | 23.660.664,00 | 25.008.971,00 | 46.920.592,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 72,62 | 89,44 | 94,27 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | | 28.400.000,00 | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 28.292.500,00 | 5.925.000,00 | 3.875.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,62 | 98,75 | 96,88 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | | 32.000.000,00 | 60.400.000,00 | 120.684.308,00 | | | 32.000.000,00 | 59.211.000,00 | 119.182.572,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 98,03 | 98,76 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 4.400.000,00 | 12.500.000,00 | 3.600.000,00 | - | - | 2.464.000,00 | 11.294.800,00 | 2.583.800,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 56,00 | 90,36 | 71,77 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | 4.400.000,00 | 4.000.000,00 | 3.600.000,00 | | | 2.464.000,00 | 2.794.800,00 | 2.583.800,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 56,00 | 69,87 | 71,77 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | - | 8.500.000,00 | - | | | | 8.500.000,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | **40.520.000,00** | **223.318.800,01** | **13.060.000,00** | **-** | **-** | **35.070.000,00** | **206.444.000,00** | **12.754.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **86,55** | **92,44** | **97,66** | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 28.320.000,00 | 216.918.800,01 | 9.860.000,00 | - | - | 28.320.000,00 | 200.164.000,00 | 9.594.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 92,28 | 97,30 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | | 27.120.000,00 | 216.918.800,01 | 9.860.000,00 | | | 27.120.000,00 | 200.164.000,00 | 9.594.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 92,28 | 97,30 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | 1.200.000,00 | - | - | | | 1.200.000,00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Prangkat daerah yang ada di Kecamatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan | | | - | - | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 12.200.000,00 | 6.400.000,00 | 3.200.000,00 | - | - | 6.750.000,00 | 6.280.000,00 | 3.160.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 55,33 | 98,13 | 98,75 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | - | | 9.000.000,00 | 6.400.000,00 | 3.200.000,00 | | | 6.750.000,00 | 6.280.000,00 | 3.160.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 75,00 | 98,13 | 98,75 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | | 3.200.000,00 | - | | | | - | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | **107.710.000,00** | **70.488.000,00** | **13.700.000,00** | **-** | **-** | **87.226.000,00** | **67.984.200,00** | **13.555.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **80,98** | **96,45** | **98,94** | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 107.710.000,00 | 20.488.000,00 | 3.700.000,00 | | | 87.226.000,00 | 20.269.000,00 | 3.680.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80,98 | 98,93 | 99,46 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | | 7.410.000,00 | 10.156.800,00 | 3.700.000,00 | | | 6.800.000,00 | 10.064.000,00 | 3.680.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91,77 | 99,09 | 99,46 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | | 100.300.000,00 | 4.200.000,00 | - | | | 80.426.000,00 | 4.152.000,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 80,19 | 98,86 | #DIV/0! | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 6.131.200,00 | | | | | 6.053.000,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,72 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 47.715.200,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95,43 | #DIV/0! | | |
| Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | - | 25.000.000,00 | - | - | - | - | 23.880.100,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95,52 | #DIV/0! | | |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | | | | 25.000.000,00 | | | | | 23.835.100,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95,34 | #DIV/0! | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | 10.000.000,00 | - | - | - | - | 9.875.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,75 | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | - | 6.000.000,00 | | | | | 5.925.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,75 | | |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | - | - | - | - | 4.000.000,00 | | | | | 3.950.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,75 | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | **69.755.000,00** | **49.552.500,00** | **68.082.000,00** | **-** | **-** | **66.910.700,00** | **47.986.200,00** | **67.297.500,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **95,92** | **96,84** | **98,85** | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 69.755.000,00 | 49.552.500,00 | 68.082.000,00 | - | - | 66.910.700,00 | 47.986.200,00 | 67.297.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95,92 | 96,84 | 98,85 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | | 67.955.000,00 | 43.152.500,00 | 63.282.000,00 | | | 65.110.700,00 | 41.686.200,00 | 62.557.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95,81 | 96,60 | 98,86 | | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | 1.800.000,00 | 6.400.000,00 | 4.800.000,00 | | | 1.800.000,00 | 6.300.000,00 | 4.740.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 98,44 | 98,75 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | **59.460.000,00** | **63.100.000,00** | **59.220.000,00** | **-** | **-** | **51.500.000,00** | **63.009.500,00** | **55.296.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **86,61** | **99,86** | **93,37** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 59.460.000,00 | 63.100.000,00 | 59.220.000,00 | - | - | 51.500.000,00 | 63.009.500,00 | 55.296.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86,61 | 99,86 | 93,37 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | | 59.460.000,00 | 63.100.000,00 | 49.620.000,00 | | | 51.500.000,00 | 63.009.500,00 | 48.976.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86,61 | 99,86 | 98,70 | | |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | 6.400.000,00 | | | | | 3.160.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 49,38 | | |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | 3.200.000,00 | | | | | 3.160.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,75 | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.800.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.740.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **98,75** | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | - | - | 4.800.000,00 | - | - | - | - | 4.740.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,75 | | |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | - | - | - | 3.200.000,00 | | | | | 3.160.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,75 | | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | - | - | - | - | 1.600.000,00 | | | | | 1.580.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,75 | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Des | - | - | - | - | - | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Jumlah | - | - | 2.969.094.012,00 | 2.856.329.770,00 | 2.921.322.169,00 | - | - | 2.726.577.076,00 | 2.689.233.543,00 | 2.427.439.926,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91,83 | 94,15 | 83,09 | | |

Sumber data : Kecamatan Bantaran

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah Kecamatan Bantaran :

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantaran

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan :

- **Keterbatasan Sumber Daya** : Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur** : Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.
- **Birokrasi yang Kaku** : Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.

- **Akses dan Kesenjangan Digital** : Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah** : Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital** : Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar-Sektor** : Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur** : Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu** : Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat** : Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bantaran

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Bantaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

**Tabel 2.6**

**Isu Strategis Kecamatan Bantaran**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti kawasan pegunungan | Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br><br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br><br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, serta kehutanan | Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

***Sumber Data : Kecamatan Bantaran***

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bantaran Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Bantaran Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantaran, dalam hal ini Kecamatan Bantaran diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang

tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Bantaran Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

**Gambar 3.1**

**Konsep Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo**

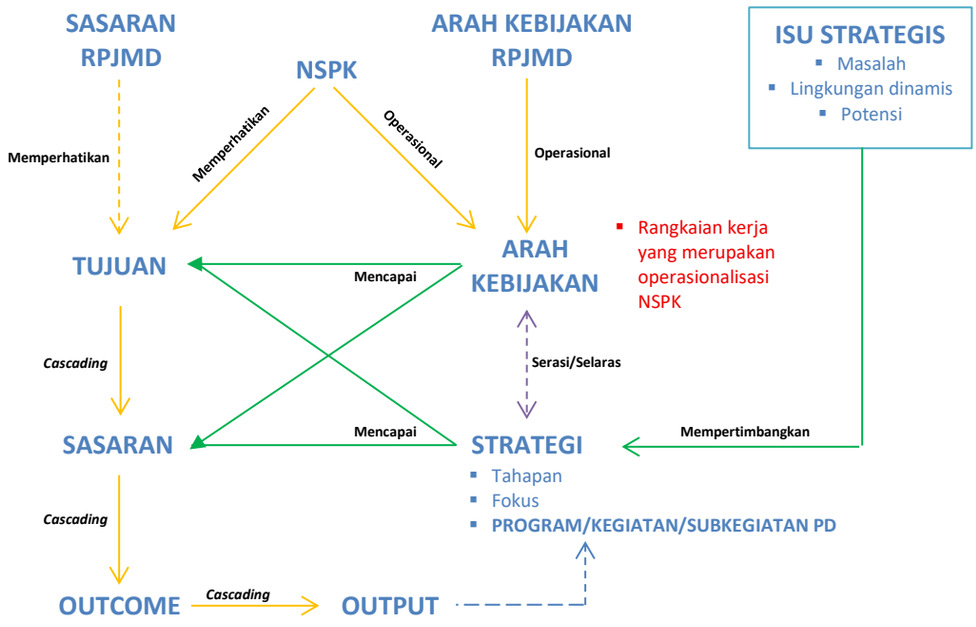


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan

Bantaran Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.2**

**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**

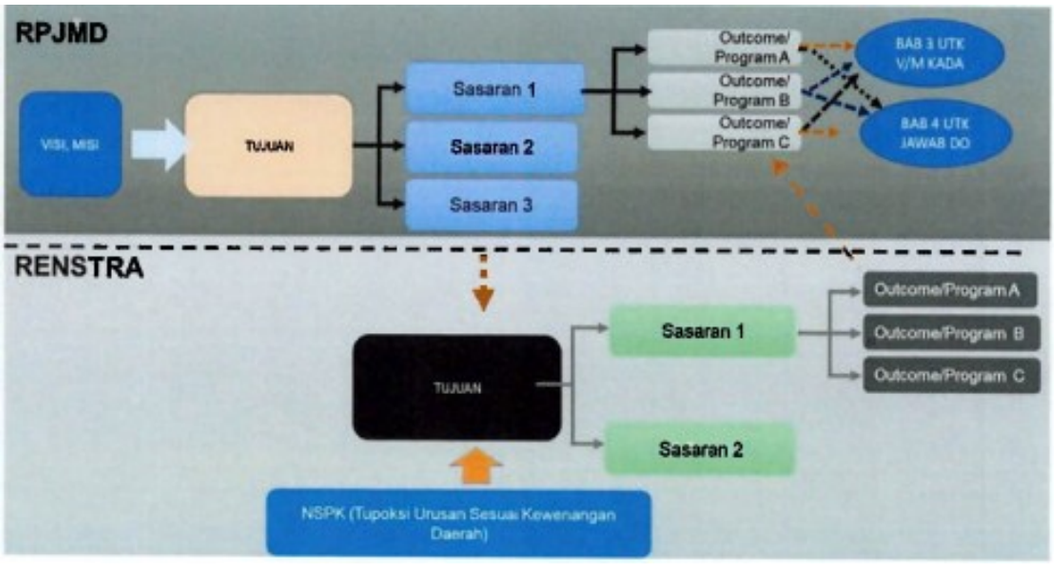


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.1**

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bantaran

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bantaran** | | | | | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas tata kelola perangkat daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 90.11 | 91.01 | 91.92 | 92.84 | 93.77 | 94.71 | 95.65 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, diperlukan Misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantaran

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

**Tabel 3.1.2**

**Definisi Operasional IKU Kecamatan Bantaran**

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut :<br>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | |
| 3. | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai hasil atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1) ——————————— X 100<br>Nilai LHE AKIP tahun (n-1)<br><br>Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Bantaran***

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bantaran dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Bantaran dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis

data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

## B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Bantaran

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Bantaran dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Kecamatan Bantaran**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

***Sumber Data : Kecamatan Bantaran***

## C. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Bantaran

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Bantaran sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Bantaran :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Bantaran dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Bantaran, sebagai berikut

**Tabel 3.3**

**Arah Kebijakan Kecamatan Bantaran**

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul; | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

***Sumber Data : Kecamatan Bantaran***

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahun, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

## Tabel 4.1

## Program Kecamatan Bantaran

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.806.786.872,1 | | 2.837.979.553,29 | | 2.880.274.561,19 | | 2.939.045.059,51 | | 3.007.962.438,6 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.690.008.172,1 | | 2.719.903.056,31 | | 2.760.438.344,95 | | 2.816.763.647,54 | | 2.882.813.662,46 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 71,85 | 71,89 | 71,92 | 2.690.008.172,1 | 71,96 | 2.719.903.056,31 | 71,99 | 2.760.438.344,95 | 72,03 | 2.816.763.647,54 | 72,07 | 2.882.813.662,46 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 12.000.000 | | 12.133.359,67 | | 12.314.185,69 | | 12.565.450,22 | | 12.860.096,23 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.133.359,67 | 100 | 12.314.185,69 | 100 | 12.565.450,22 | 100 | 12.860.096,23 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 12.000.000 | | 12.133.359,67 | | 12.314.185,69 | | 12.565.450,22 | | 12.860.096,23 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.133.359,67 | 100 | 12.314.185,69 | 100 | 12.565.450,22 | 100 | 12.860.096,23 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 56.778.700 | | 57.409.699,07 | | 58.265.287,92 | | 59.454.160,69 | | 60.848.295,48 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 56.778.700 | 100 | 57.409.699,07 | 100 | 58.265.287,92 | 100 | 59.454.160,69 | 100 | 60.848.295,48 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 28.000.000 | | 28.311.172,57 | | 28.733.099,94 | | 29.319.383,84 | | 30.006.891,2 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 28.000.000 | 100 | 28.311.172,57 | 100 | 28.733.099,94 | 100 | 29.319.383,84 | 100 | 30.006.891,2 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 8.000.000 | | 8.088.906 | | 8.209.457 | | 8.376.967 | | 8.573.397 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.088.906 | 100 | 8.209.457 | 100 | 8.376.967 | 100 | 8.573.397 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2806786872.10 | | 2837979553.29 | | 2880274561.19 | | 2939045059.51 | | 3007962438.60 | |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bantaran

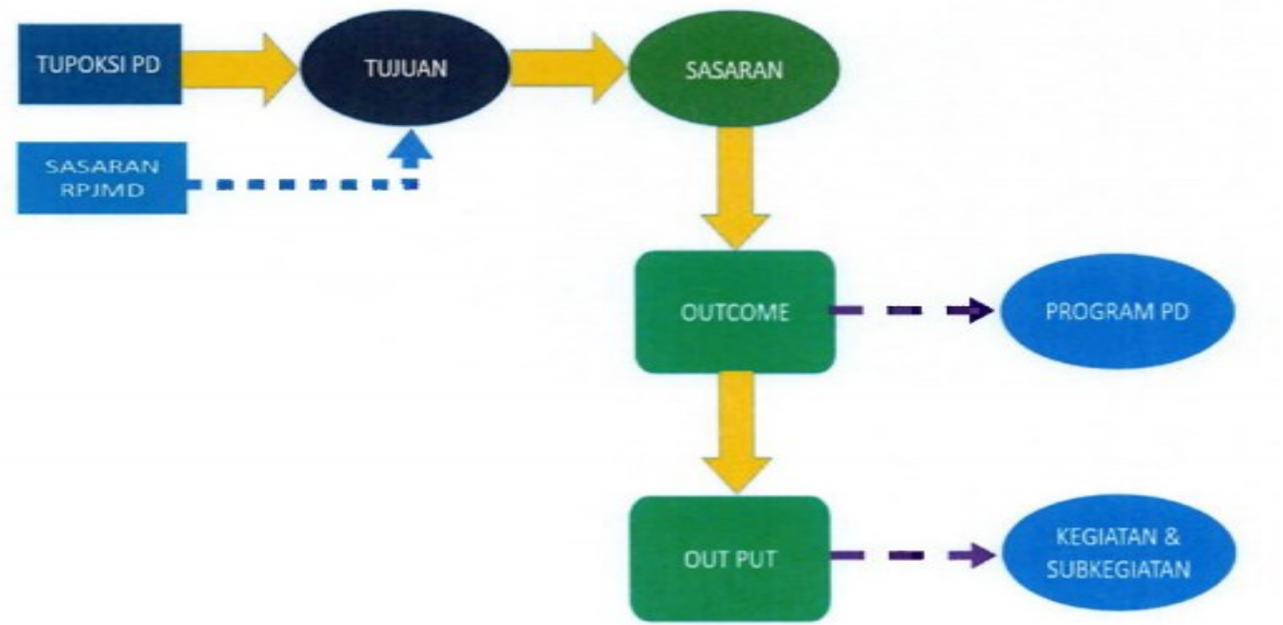

**Tabel 4.2**

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Bantaran

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bantaran** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas tata kelola perangkat daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | Persentase Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Prosentase pemenuhan administrasi umum PD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | Prsentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prosentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2.1**

**Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Bantaran**

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Bantaran***

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bantaran**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.806.786.872,1 | | 2.837.979.553,29 | | 2.880.274.561,19 | | 2.939.045.059,51 | | 3.007.962.438,6 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 2.690.008.172,1 | | 2.719.903.056,31 | | 2.760.438.344,95 | | 2.816.763.647,54 | | 2.882.813.662,46 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 71,85 | 91,92 | 2.690.008.172,1 | 71,96 | 2.719.903.056,31 | 71,99 | 2.760.438.344,95 | 72,03 | 2.816.763.647,54 | 72,07 | 2.882.813.662,46 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bantaran | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 832.000 | | 841.244 | | 853.778 | | 871.195 | | 891.625 | | |
| Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 832.000 | 2 | 841.244 | 2 | 853.778 | 2 | 871.195 | 2 | 891.625 | | |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 832.000 | | 841.244 | | 853.778 | | 871.195 | | 891.625 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | 2 | 832.000 | 2 | 841.244 | 2 | 853.778 | 2 | 871.195 | 2 | 891.625 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.318.993.628,1 | | 2.344.766.539,31 | | 2.379.712.295,95 | | 2.428.270.787,54 | | 2.485.210.643,46 | | |
| Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 14 | 14 | 2.318.993.628,1 | 14 | 2.344.766.539,31 | 14 | 2.379.712.295,95 | 14 | 2.428.270.787,54 | 14 | 2.485.210.643,46 | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.318.993.628,1 | | 2.344.766.539,31 | | 2.379.712.295,95 | | 2.428.270.787,54 | | 2.485.210.643,46 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 14 | 14 | 2.318.993.628,1 | 14 | 2.344.766.539,31 | 14 | 2.379.712.295,95 | 14 | 2.428.270.787,54 | 14 | 2.485.210.643,46 | | |
| 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 12.738.000 | | 12.879.519 | | 13.071.424 | | 13.338.081 | | 13.650.859 | | |
| Persentase Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 1 | 12.738.000 | 1 | 12.879.519 | 1 | 13.071.424 | 1 | 13.338.081 | 1 | 13.650.859 | | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /** | **INDIKATOR OUTCOME /** | **BASELINE TAHUN** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |

| KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | OUTPUT | 2024 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 12.738.000 | | 12.879.519 | | 13.071.424 | | 13.338.081 | | 13.650.859 | | |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 1 | 12.738.000 | 1 | 12.879.519 | 1 | 13.071.424 | 1 | 13.338.081 | 1 | 13.650.859 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 29.532.800 | | 29.860.910 | | 30.305.836 | | 30.924.075 | | 31.649.246 | | |
| Prosentase pemenuhan administrasi umum PD | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 3 | 29.532.800 | 3 | 29.860.910 | 3 | 30.305.836 | 3 | 30.924.075 | 3 | 31.649.246 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.648.700 | | 2.678.127 | | 2.718.031 | | 2.773.479 | | 2.838.517 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 2.648.700 | 12 | 2.678.127 | 12 | 2.718.031 | 12 | 2.773.479 | 12 | 2.838.517 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.873.100 | | 4.927.240 | | 5.000.656 | | 5.102.669 | | 5.222.327 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 3 | 4.873.100 | 3 | 4.927.240 | 3 | 5.000.656 | 3 | 5.102.669 | 3 | 5.222.327 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 1.836.000 | | 1.856.398 | | 1.884.058 | | 1.922.493 | | 1.967.576 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 1.836.000 | 1 | 1.856.398 | 1 | 1.884.058 | 1 | 1.922.493 | 1 | 1.967.576 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1.425.000 | | 1.440.832 | | 1.462.300 | | 1.492.131 | | 1.527.122 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 6 | 6 | 1.425.000 | 6 | 1.440.832 | 6 | 1.462.300 | 6 | 1.492.131 | 6 | 1.527.122 | | |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 18.750.000 | | 18.958.313 | | 19.240.791 | | 19.633.303 | | 20.093.704 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 18.750.000 | 12 | 18.958.313 | 12 | 19.240.791 | 12 | 19.633.303 | 12 | 20.093.704 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 25.060.000 | | 25.338.417 | | 25.715.959 | | 26.240.565 | | 26.855.906 | | |
| Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 5 | 25.060.000 | 5 | 25.338.417 | 5 | 25.715.959 | 5 | 26.240.565 | 5 | 26.855.906 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 25.060.000 | | 25.338.417 | | 25.715.959 | | 26.240.565 | | 26.855.906 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 5 | 25.060.000 | 5 | 25.338.417 | 5 | 25.715.959 | 5 | 26.240.565 | 5 | 26.855.906 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 262.793.244 | | 265.712.877 | | 269.671.999 | | 275.173.307 | | 281.626.121 | | |
| Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 262.793.244 | 12 | 265.712.877 | 12 | 269.671.999 | 12 | 275.173.307 | 12 | 281.626.121 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 2 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 72,03 | | 1 | | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72,03 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 35.101.192 | | 35.491.166 | | 36.019.985 | | 36.754.792 | | 37.616.692 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 35.101.192 | 12 | 35.491.166 | 12 | 36.019.985 | 2 | 36.754.792 | 12 | 37.616.692 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 227.692.052 | | 230.221.711 | | 233.652.014 | | 238.418.515 | | 244.009.429 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 227.692.052 | 12 | 230.221.711 | 12 | 233.652.014 | 12 | 238.418.515 | 12 | 244.009.429 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 40.058.500 | | 40.503.550 | | 41.107.053 | | 41.945.637 | | 42.929.262 | | |
| Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 6 | 6 | 40.058.500 | 6 | 40.503.550 | 6 | 41.107.053 | 6 | 41.945.637 | 6 | 42.929.262 | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 40.058.500 | | 40.503.550 | | 41.107.053 | | 41.945.637 | | 42.929.262 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | 10 | 40.058.500 | 10 | 40.503.550 | 10 | 41.107.053 | 10 | 41.945.637 | 10 | 42.929.262 | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 12.000.000 | | 12.133.359,67 | | 12.314.185,69 | | 12.565.450,22 | | 12.860.096,23 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.133.359,67 | 100 | 12.314.185,69 | 100 | 12.565.450,22 | 100 | 12.860.096,23 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bantaran | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 8.000.000 | | 8.088.880 | | 8.209.404 | | 8.376.876 | | 8.573.314 | | |
| Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 6 | 6 | 8.000.000 | 6 | 8.088.880 | 6 | 8.209.404 | 6 | 8.376.876 | 6 | 8.573.314 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 8.000.000 | | 8.088.880 | | 8.209.404 | | 8.376.876 | | 8.573.314 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 6 | 6 | 8.000.000 | 6 | 8.088.880 | 6 | 8.209.404 | 6 | 8.376.876 | 6 | 8.573.314 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 4.000.000 | | 4.044.479,67 | | 4.104.781,69 | | 4.188.574,22 | | 4.286.782,23 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 5 | 5 | 4.000.000 | 5 | 4.044.479,67 | 5 | 4.104.781,69 | 5 | 4.188.574,22 | 5 | 4.286.782,23 | | |
| 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | 4.000.000 | | 4.044.479,67 | | 4.104.781,69 | | 4.188.574,22 | | 4.286.782,23 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 5 | 5 | 4.000.000 | 5 | 4.044.479,67 | 5 | 4.104.781,69 | 5 | 4.188.574,22 | 5 | 4.286.782,23 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 12.000.000 | | 12.133.359,67 | | 12.314.185,69 | | 12.565.450,22 | | 12.860.096,23 | | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT** | **INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT** | **BASELINE TAHUN 2024** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |
| | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | | |
| | | | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.133.359,67 | 100 | 12.314.185,69 | 100 | 12.565.450,22 | 100 | 12.860.096,23 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bantaran | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 6.000.000 | | 6.066.699,67 | | 6.157.132,69 | | 6.282.793,22 | | 6.430.111,23 | | |
| Prsentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.066.699,67 | 2 | 6.157.132,69 | 2 | 6.282.793,22 | 2 | 6.430.111,23 | | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | |
| | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 2.000.000 | | 2.022.259,67 | | 2.052.430,69 | | 2.094.355,22 | | 2.143.455,23 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga | 7 | 7 | 2.000.000 | 7 | 2.022.259,67 | 7 | 2.052.430,69 | 7 | 2.094.355,22 | 7 | 2.143.455,23 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 2.000.000 | | 2.022.220 | | 2.052.351 | | 2.094.219 | | 2.143.328 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.022.220 | 2 | 2.052.351 | 2 | 2.094.219 | 2 | 2.143.328 | | |
| 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 2.000.000 | | 2.022.220 | | 2.052.351 | | 2.094.219 | | 2.143.328 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | 2.000.000 | 3 | 2.022.220 | 3 | 2.052.351 | 3 | 2.094.219 | 3 | 2.143.328 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 6.000.000 | | 6.066.660 | | 6.157.053 | | 6.282.657 | | 6.429.985 | | |
| Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 40 | 40 | 6.000.000 | 40 | 6.066.660 | 40 | 6.157.053 | 40 | 6.282.657 | 40 | 6.429.985 | | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 40 | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 2.000.000 | | 2.022.220 | | 2.052.351 | | 2.094.219 | | 2.143.328 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 40 | 40 | 2.000.000 | 40 | 2.022.220 | 40 | 2.052.351 | 40 | 2.094.219 | 40 | 2.143.328 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 4.000.000 | | 4.044.440 | | 4.104.702 | | 4.188.438 | | 4.286.657 | | |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 40 | 40 | 4.000.000 | 40 | 4.044.440 | 40 | 4.104.702 | 40 | 4.188.438 | 40 | 4.286.657 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 56.778.700 | | 57.409.699,07 | | 58.265.287,92 | | 59.454.160,69 | | 60.848.295,48 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 56.778.700 | 100 | 57.409.699,07 | 100 | 58.265.287,92 | 100 | 59.454.160,69 | 100 | 60.848.295,48 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bantaran | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 56.778.700 | | 57.409.699,07 | | 58.265.287,92 | | 59.454.160,69 | | 60.848.295,48 | | |
| Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 5 | 5 | 56.778.700 | 5 | 57.409.699,07 | 5 | 58.265.287,92 | 5 | 59.454.160,69 | 5 | 60.848.295,48 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 52.778.700 | | 53.365.171 | | 54.160.511 | | 55.265.679 | | 56.561.545,48 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | 52.778.700 | 3 | 53.365.171 | 3 | 54.160.511 | 3 | 55.265.679 | 3 | 56.561.545,48 | | |
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 4.000.000 | | 4.044.528,07 | | 4.104.776,92 | | 4.188.481,69 | | 4.286.750 | | |
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 5 | 5 | 4.000.000 | 5 | 4.044.528,07 | 5 | 4.104.776,92 | 5 | 4.188.481,69 | 5 | 4.286.750 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 28.000.000 | | 28.311.172,57 | | 28.733.099,94 | | 29.319.383,84 | | 30.006.891,2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 28.000.000 | 100 | 28.311.172,57 | 100 | 28.733.099,94 | 100 | 29.319.383,84 | 100 | 30.006.891,2 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bantaran | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT** | **INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT** | **BASELINE TAHUN 2024** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |
| | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | | |
| | | | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 28.000.000 | | 28.311.172,57 | | 28.733.099,94 | | 29.319.383,84 | | 30.006.891,2 | | |
| Prosentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 327 | 327 | 28.000.000 | 327 | 28.311.172,57 | 327 | 28.733.099,94 | 327 | 29.319.383,84 | 327 | 30.006.891,2 | | |
| | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 28.000.000 | | 28.311.172,57 | | 28.733.099,94 | | 29.319.383,84 | | 30.006.891,2 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta | 327 | 327 | 28.000.000 | 327 | 28.311.172,57 | 327 | 28.733.099,94 | 327 | 29.319.383,84 | 327 | 30.006.891,2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 8.000.000 | | 8.088.906 | | 8.209.457 | | 8.376.967 | | 8.573.397 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.088.906 | 100 | 8.209.457 | 100 | 8.376.967 | 100 | 8.573.397 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bantaran | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 8.000.000 | | 8.088.906 | | 8.209.457 | | 8.376.967 | | 8.573.397 | | |
| Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 8.000.000 | 2 | 8.088.906 | 2 | 8.209.457 | 2 | 8.376.967 | 2 | 8.573.397 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 8.000.000 | | 8.088.906 | | 8.209.457 | | 8.376.967 | | 8.573.397 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 8.000.000 | 2 | 8.088.906 | 2 | 8.209.457 | 2 | 8.376.967 | 2 | 8.573.397 | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas. Penetapannya berlandaskan pada isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kemampuan pendanaan daerah. Secara eksplisit, Program Prioritas Kecamatan Bantaran dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Bantaran** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE KERJA |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantaran sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantaran**

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Bantaran | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 91,00 | |
| 2 | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 91.01 | 91.92 | 92.84 | 93.77 | 94.71 | 95.65 | |
| 3 | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bantaran sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Bantaran**

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **NIHIL** | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Bantaran.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Bantaran.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Bantaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Bantaran.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Bantaran. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;

2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;
3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

CAMAT BANTARAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN BANTARAN

**JUNAEDI, S.Sos. M.SI**
Pembina Tingkat I
NIP. 196906271990031004

# RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN BANYUANYAR

TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, rnarilah kita bersarna-sarna tetap rnelaksanakan amanah dalam bidang tugas kita maslng-maslng bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai. Rencana Strategis Kecamatan BANYUANYAR Tahun 2025-2029 disusun untuk rnemberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecarnatan BANYUANYAR Kabupaten Probolinggo tahun 2025– 2029 ini rnengacu pada visi, misi dan program Bupati Probolinggo yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan sernoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, September 2025

**Camat BANYUANYAR**

**HUDAN KURNIAWAN,S.H,M.Si**

**Pembina**

**NIP. 197504292002121005**

# DAFTAR ISI


**KATA PENGANTAR** ..... **2**

**BAB I** ..... 5

**PENDAHULUAN** ..... 5

**1.1 Latar Belakang** ..... **5**

**1.2 Landasan Hukum** ..... **6**

**1.3 Maksud dan Tujuan** ..... **9**

**1.4 Sistematika Penulisan** ..... **9**

**BAB II** ..... **11**

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** ..... **11**

**2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan BANYUANYAR** ..... **11**

**2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** ..... 2**5**

**BAB III** ..... 2**7**

**TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... 2**7**

**3.1 Tujuan Renstra Kecamatan BANYUANYARTahun 2025-2029** ..... 2**7**

**3.2 Sasaran Renstra Kecamatan BANYUANYARTahun 2025-2029** ..... 2**7**

**3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan BANYUANYAR Tahun 2025- 2029** ..... 3**2**

**3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan BANYUANYAR Tahun 2025-2029** ..... 3**3**

**BAB IV** ..... 3***5***

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** ..... 3**5**

**4.1 Uraian Program** ..... 3**5**

**4.2 Uraian Kegiatan** ..... 3**7**

**BAB V** ..... **55**

**PENUTUP** ..... **55**

# DAFTAR TABEL

*Tabel 2.1.b.1 Jumlah Pegawai Kecamatan BANYUANYAR Berdasarkan pangkat dan Golongan tahun 2025*

*Tabel 2.1.b.2 Jumlah Sarana Prsasarana Kecamatan BANYUANYAR Kabupaten Probolinggo Tahun 2025*

*Tabel 2.1.c Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan BANYUANYAR*

*Tabel 2.2 Isu Strategis Kecamatan BANYUANYAR*

**Tabel 3.2.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan BANYUANYAR**

*Tabel 3.2.2. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan BANYUANYAR Tahun 2025-2029 (Isi diambil dari T-C 26)*

*Tabel 3.3 Penahapan Rencana Strategis (Renstra)*

*Table 3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) dan Pendanaan*

*Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukum Program Prioritas Pembangunan Daerah*

*Table 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah*

*Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci*

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan BANYUANYAR Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan BANYUANYARKabupaten Probolinggo yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan BANYUANYAR Tahun 2025—2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan BANYUANYAR yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan BANYUANYAR yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan BANYUANYAR sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka secara otomatis Renstra Kecamatan BANYUANYAR juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Probolinggo, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

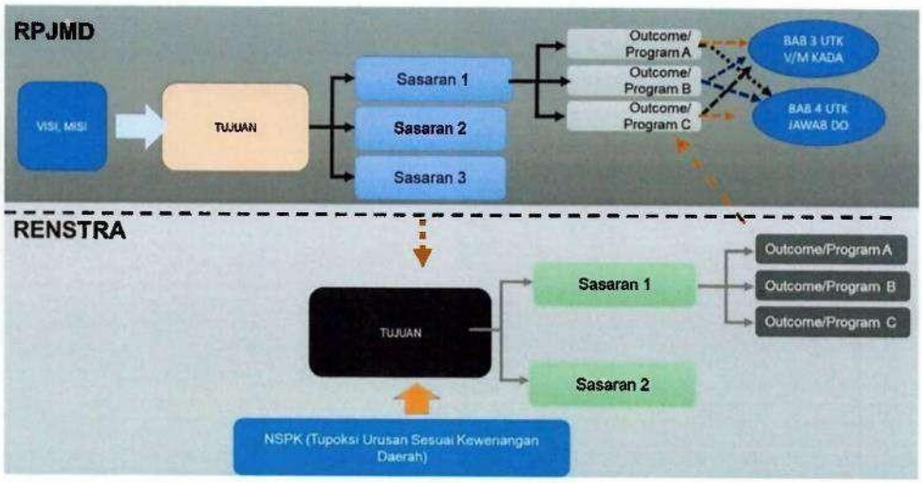


Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan BANYUANYAR yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Probolinggo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan BANYUANYAR. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan BANYUANYAR dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan BANYUANYAR Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan ke Tiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentangf Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2024-2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 1 Seri D;
36. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo;
37. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 19 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan BANYUANYAR Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan BANYUANYAR Kabupaten Probolinggo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan BANYUANYARTahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan BANYUANYAR ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan BANYUANYAR sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan BANYUANYAR Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan BANYUANYAR

### a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan BANYUANYAR

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatnnya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan BANYUANYAR

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan tentang Kedudukan Kabupaten Probolinggo, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan BANYUANYAR :

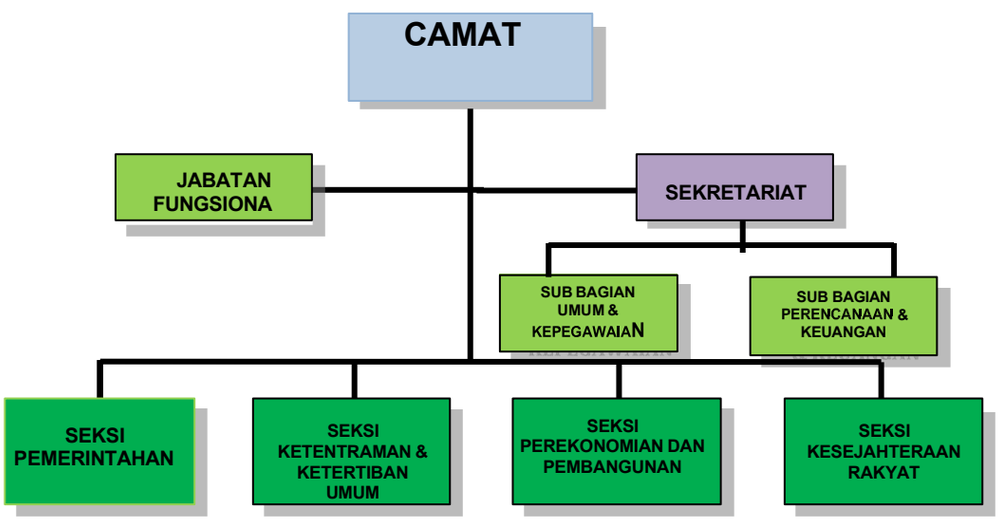

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan BANYUANYAR Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

(1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

(1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;

b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milikdaerah;

c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah padaKecamatan dan Kelurahan;

d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;

e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;

f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);

g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;

h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

3. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai**

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milikdaerah serta pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :

a. pelaksanaan urusan administrasi umum;

b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;

c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana danprasarana serta pemeliharaan;

d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;

e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

4. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran,

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah;

b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran sertaakuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d. pengelolaan urusan administrasi keuangan; pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadappengelolaan keuangan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. Kepala Seksi Pemerintahan**

(1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yangmeliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atauDesa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

(1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibanumum.

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan KepolisianNegara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

b. persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

c. persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

d. pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata.

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

(1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi

dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahanpokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutanpenumpang umum;

e. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehCamat.

8. **Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat**

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat.

(2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. Kelompok Jabatan Fungsional**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahansesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenagafungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan.
(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan BANYUANYAR

Struktur Organisasi Kecamatan BANYUANYAR Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat.
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Berikut merupakan data pegawai Kecamatan BANYUANYARTahun 2025.

Tabel 2.1.b.1
Data Pegawai Kecamatan BANYUANYAR

| No | Uraian | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| I | Pegawai PNS | 11 | 2 | 13 |
| II | Pegawai CPNS | - | - | - |
| III | Pegawai PPPK | - | 1 | 1 |
| IV | Non PNS | 3 | 2 | 5 |
| V | Tingkat Pendidikan CPNS dan PNS : | | | |
| | 1. SLTA | 2 | 2 | 4 |
| | 2. D-3 | - | - | - |
| | 3. D-4 | - | - | - |
| | 4. S1 | 3 | 4 | 7 |
| | 5. S2 | 3 | 1 | 4 |
| VI | Golongan Kepangkatan CPNS dan PNS: | | | |
| | 1. II a | - | - | - |
| | 2. II b | - | - | - |
| | 3. II c | 1 | - | 1 |
| | 1. II d | 4 | 1 | 5 |
| | 2. III a | - | - | = |
| | 3. III b | 1 | - | 1 |
| | 4. III c | - | - | - |
| | 5. III d | 2 | 1 | 3 |
| | 9. IV a | 2 | - | 2 |
| | 10. IV b | - | - | - |
| VII | Golongan PPPK: | - | 1 | 1 |
| | | - | - | - |
| V | Agama: | | | |
| | Islam | 14 | 5 | 19 |
| | Katolik | - | - | - |
| | Budha | - | - | - |
| | Hindu | - | - | - |
| | Lainnya | - | - | - |
| VI | Pejabat struktural | 5 | 1 | 6 |
| VII | Fungsional umum/Staf | 9 | 4 | 13 |

Sumber data: Kecamatan BANYUANYAR 2025

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan BANYUANYAR terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa LIPRAK KIDUL Kecamatan BANYUANYAR Kabupaten Probolinggo Jalan Raya BANYUANYAR No. 14 RT. 02 RW. 01 KECAMATAN BANYUANYAR Kabupaten Probolinggo.

**Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Banyuanyar**

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.b.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan BANYUANYAR

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak Berat (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Portable Generating Set | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Electric Generating Set Lain-Lain | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Sport Utility Vehicle (SUV) | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Sepeda Motor | 10 | 9 | 1 |
| 7 | Termometer Standar | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Lemari Penyimpan | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Lemari Besi/Metal | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Lemari Kayu | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Rak Besi | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Filing Cabinet Besi | 6 | 4 | 2 |
| 13 | Brandkas | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Lemari Kaca | 1 | 1 | 0 |
| 15 | CCTV - Camera Control Television System | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Alat Penghancur Kertas | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Mesin Absensi | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Meja Kerja Kayu | 29 | 11 | 18 |
| 19 | Kursi Besi/Metal | 52 | 52 | 0 |
| 20 | Meja Rapat | 5 | 1 | 4 |
| 21 | Meja Panjang | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Meja 1/2 Biro | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Kursi Fiber Glas/Plastik | 59 | 35 | 24 |
| 24 | Kursi Tamu | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Kursi Lipat | 29 | 11 | 18 |
| 26 | Sofa | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Mesin Pemotong Rumput | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Lemari Es | 1 | 1 | 0 |
| 29 | A.C. Window | 6 | 6 | 0 |
| 30 | A.C. Split | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Kipas Angin | 8 | 8 | 0 |
| 32 | Televisi | 4 | 3 | 1 |
| 33 | Sound System | 2 | 2 | 0 |
| 34 | Wireless | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Camera Video | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Mimbar/Podium | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Handtruck Troly Plastics | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Lain-lain Meja Kerja Pejabat | 4 | 4 | 0 |
| 40 | Meja Tamu Biasa | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Kursi Kerja | 11 | 6 | 5 |
| 43 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III | 3 | 3 | 0 |
| 45 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 4 | 4 | 0 |
| 46 | Audio Amplifier | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Microphone/Wireless MIC | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Layar Film/Projector | 1 | 1 | 0 |
| 49 | P.C Unit | 10 | 7 | 3 |
| 50 | Lap Top | 20 | 14 | 6 |
| 51 | Note Book | 1 | 1 | 0 |
| 52 | CPU (Peralatan Personal Komputer) | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 21 | 12 | 9 |
| 54 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 2 | 2 | 0 |
| 55 | External/ Portable Hardisk | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Hard disk Eksternal | 3 | 3 | 0 |
| 57 | Genset | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Mesin Tik Lain-Lain | 3 | 0 | 3 |
| 59 | Rak Kayu | 3 | 0 | 3 |
| 60 | Papan Visual/Papan Nama | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Kursi Kayu | 9 | 0 | 9 |
| 62 | Lain-lain Komputer Jaringan | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Station Wagon | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Facsimile | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Mesin Hitung Manual | 1 | 0 | 1 |

**c. Kinerja Pelayanan Kecamatan BANYUANYAR**

Kecamatan BANYUANYAR menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan BANYUANYAR dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **baik** dengan **rasio**

**capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan BANYUANYAR berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 98 (2021) menjadi 99 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2022.
- **Persentase pelayanan sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 97% (2021) ke 99% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator **nilai SAKIP** dan **reformasi birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian NA di Tahun 2024 yaitu 74,48, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data perbandingan antara realisasi dan capaian berbasis kinerja dengan realisasi dan capaian berbasis Anggaran di dalam Indikator kinerja (IKU) kecamatan BANYUANYAR yaitu:

- IKU Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas dengan target 100%, capaian kinerja 84,28% dengan capaian realisasi anggaran 99,71% dengan tingkat efisiensi -15,73% kategori belum efisien.
- IKU Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi target 100%, capaian kinerja 99% dengan capaian realisasi anggaran 99,75% dengan tingkat efisiensi -0,75% kategori belum efisien.
- IKU Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan target 100%, capaian kinerja 95% dengan capaian realisasi anggaran 99,80% dengan tingkat efisiensi -4,8% kategori belum efisien
- IKU Persentase desa/kelurahan yang telah dibina target 100%, capaian kinerja 90% dengan capaian realisasi anggaran 0% dengan tingkat efisiensi 90% kategori efisien**,** kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan tugas - tugas pelimpahan yang dilaksanakan oleh kecamatan
- IKU Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah target 0,5%, realisasi dan capaian nilai AKIP Tahun 2024 oleh APIP di Bulan Maret 2025 yaitu 72,21.

  Secara keseluruhan, Kecamatan BANYUANYAR menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

**Tabel 2.1.1.c**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan BANYUANYAR**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | SPM | Target Indikator Lainnya | Realisasi 2020 | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | | | | | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 81,96% | 84,73% | 84,28% | 5,7% | 81% |
| 2 | Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan | | | | | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 86.91% | 93,4 % | 95% | 8,9% | 90% |
| 3 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | | | | | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 95% | 99% | 99,75 % | 2,10% | 93% |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | | | | | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% |
| 5 | Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah | | | | | 71,24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71,95 | 71,15 | 71,71 | 72,21 | 2,5% | 71 |

Kecamatan BANYUANYAR menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai mendekati target, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 84,28, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, , umumnya berkinerja "**Baik"**. Kecamatan BANYUANYAR telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

**d. Kelompok sasaran layanan Kecamatan BANYUANYAR**

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi

operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan BANYUANYAR dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan BANYUANYAR Kabupaten Probolinggo yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.2
## Isu Strategis Kecamatan BANYUANYAR

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Potensi Pertanian dan Perkebunan | Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan | Lahan yang terkontaminasi oleh Limbah Rumah Tangga di sepanjang sungai besar pekalen yang ada di wilayah Banyuanyar, bekas tol dan galian c. | Desentralisasi dan Otonomi Daerah | Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan | Keterbatasan Kewenangan Kecamatan | Belum Optimalnya Penyelanggaraan Pelayanan Kecamatan |
| Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa | Lahan yang terkontaminasi oleh Limbah Rumah Tangga di sepanjang sungai besar pekalen yang ada di wilayah Kecamatan Banyuanyar, bekas tol di Desa Pendil, Desa Alas Sapi, Banyuanyar Tengah, Liprak Wetan, Liprak Kulon dan Galian C di desa Gunung Geni. | Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal | Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan | Disparitas Antar Wilayah | Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa |
| Potensi Wisata | | Sungai besar pekalen yang ada di wilayah Kecamatan Banyuanyar. | Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan | Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor | Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten | |
| Potensi Sumber Daya Manusia | | | Digitalisasi dan Pelayanan Publik | Pelayanan Publik yang Belum Optimal | Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu | |
| Potensi Desa Wisata dan Agrowisata | | Terdapat lahan bekas galian C bekas Tol yang belum di fungsikan sehingga menjadi genangan air saat musim penghujan | Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis | Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi | Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan untuk mewujudkan swasembada pangan Nasional | | Adanya banjir yang terjadi di Kecamatan BANYUANYAR di desa Liprak Kulon, Liprak Wetan, Liprak Kidul yang bersumber dari Hutan Jati Raya. | Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan | Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan | Lemahnya Implementasi e-Government | |
| | | Layanan pencegahan proteksi kebakaran belum dilakukan dengan optimal di Kecamatan BANYUANYAR, | Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat | Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial | Partisipasi Masyarakat dan Transparansi | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adanya bangunan liar dan kios dagang liar di bantalan jalan sepanjang wilayah Kecamatan BANYUANYAR | | Penanganan Konflik Sosial dan Bencana | | |
| | | Masih adanya kasus stunting, angka putus sekolah dan pernikahan dini yang tinggi di Kecamatan BANYUANYAR | | | | |
| | | Rendahnya perlindungan anak dan perempuan dari Kekerasan, kasus narkoba yang berimbas pada kriminalitas anak dibawah umur di BANYUANYAR | | | | |
| | | Menurunnya nilai wawasan kebangsaan generasi muda (di seluruh Kabupaten Probolinggo). | | | | |

# BAB III
# TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan BANYUANYAR Tahun 2025 - 2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan BANYUANYAR Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan BANYUANYAR menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***. Tujuan tersebut selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: "***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan BANYUANYAR, dalam hal ini Kecamatan BANYUANYAR Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan BANYUANYAR Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan BANYUANYAR menetapkan sasaran strategi ”Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan BANYUANYAR tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan BANYUANYAR Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan BANYUANYAR

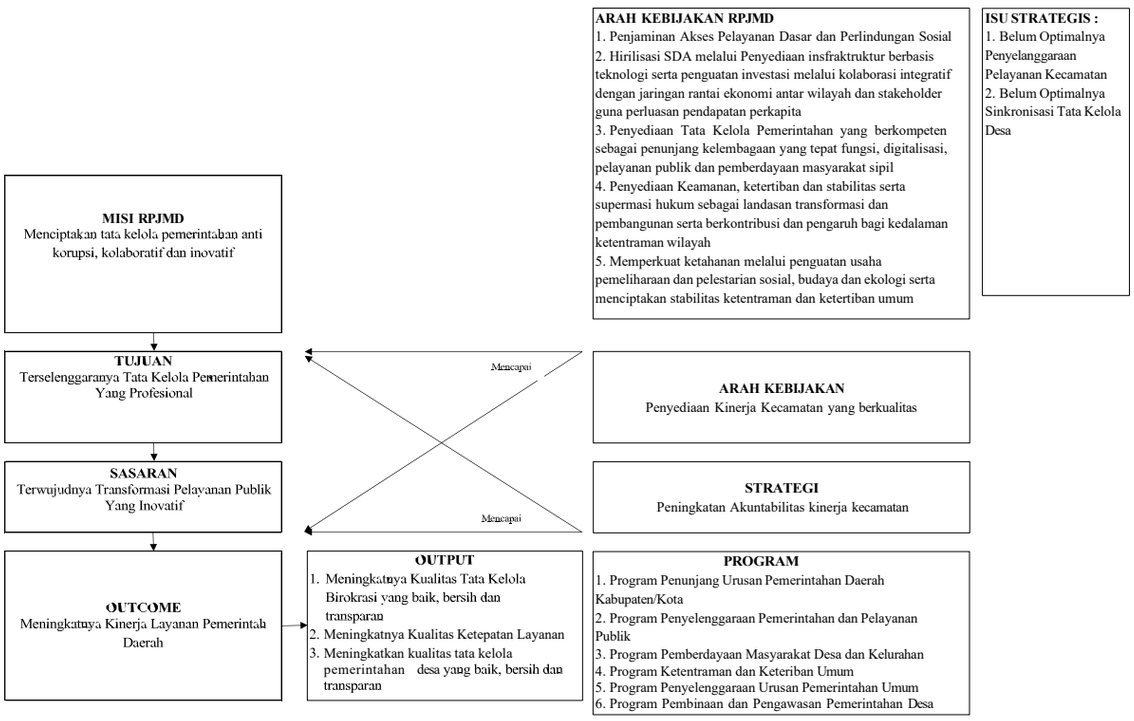


RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan BANYUANYAR yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah

3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

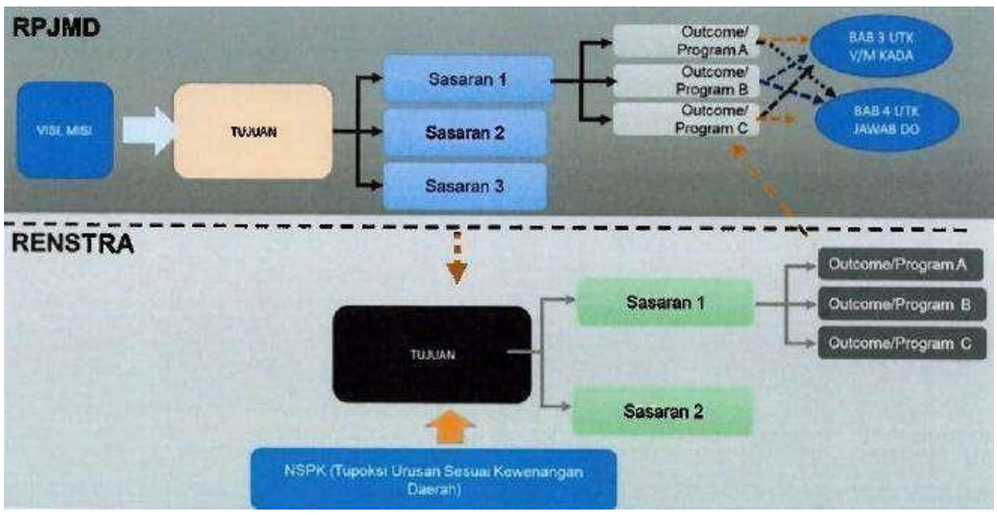


**Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan BANYUANYAR** adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. **Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :**

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (**Specific**, **Measurable**, **Achievable, Relevant, Time-bound**) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan BANYUANYAR dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan BANYUANYAR

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | IKM Kecamatan | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,5 | 90,00 | 91,00 | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | Nilai LHE AKIP |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara berkualitas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Nilai SKM e SUKMA Prop Jatim |

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Serta memperhatikan Devinisi Operasional sudah ditetapkan dengan perhitungan rumus yang telah ditentukan.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan

Misi kemudian dijabarkan ke dalam **Strategi Pembangunan**, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam **Arah Kebijakan**, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh

setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.2.2. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan BANYUANYAR Tahun 2025-2029 (Isi diambil dari T-C 26)

| VISI : **TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO SAE, SEJAHTERA, AMANAH RELIGIUS SERTA EXSIS BERDAYA SAING** | | | |
|---|---|---|---|
| MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif | | | |
| **TUJUAN** | **SASARAN** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah<br>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan` | 1 Penguatan Sistem Perencanaan dan engukuran Kinerja<br>2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan<br>3 Pemanfaatan Teknologi Informasi<br>4 Transparansi dan Pelibatan Publik<br>5 Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan | 1 Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik<br>2 Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi<br>3 Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting<br>4 Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran<br>5 Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat |
| | | Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat | 1 Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses<br>2 Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan<br>3 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan<br>4 Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik<br>5 Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas |

## 3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan BANYUANYARTahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

**Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan BANYUANYAR** sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. **Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan BANYUANYAR:**

1. Meningkatkan **ketepatan sasaran** program/kegiatan.
2. Mempermudah **koordinasi antarperangkat daerah**.
3. Mendukung **pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah**.
4. Menunjang **penggunaan sistem informasi pembangunan daerah**.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik) | Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik) | Permberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat) | Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes) | Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat) |

## 3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan BANYUANYARTahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan BANYUANYAR sebagai berikut :

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan BANYUANYAR

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN ) Mempercepat | 1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Probolinggo<br>2. Peningkatan Dan Perluasan Akses Terhadap Hak-Hak Dasar Masyarakat (Miskin, Rentan, Dan Termarginalkan) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan, Khususnya Kemiskinan Ekstrem<br>3. Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Kolaboratif, Dan Inovatif<br>4. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah sebagai Pilar Kemajuan Daerah | 1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan<br>2. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja<br>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi<br>4. Transparansi dan Pelibatan Publik<br>5. Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten<br>6. Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik<br>7. Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi<br>8. Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting<br>9. Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran<br>10. Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat<br>11. Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah diakses<br>12. Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan | |
| 2 | Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata (SAE INFRASTRUKTUR) | | | |
| 3 | Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan (SAE EKONOMI) Peningkatan kemandirian Masyarakat Miskin | | | |
| 4 | Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau (SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN) | | | |
| 5 | Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas (SAE SOSIAL) | | | |

**Sumber Data :** **RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo;**
**Lampiran Perda Nomor 5 Tahun 2025 Bab 3 halaman III/59**

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan BANYUANYAR ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan BANYUANYAR adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam memberdayakan kelompok – kelompok masyarakat desa dan kelurahan untuk wujudkan peningkatan pendidikan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang adil , merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di

kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat pedesaan dan kelurahan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkuan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan sebagai sarana komunikasi serta menampung aspirasi dan permasalahan dimasyarakat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Banyuanyarmerupakan **Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya**, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Banyuanyar juga merupakan proses strategis yang harus **terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah**. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Banyuanyar serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Banyuanyar dijelaskan pada gambar

dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Banyuanyar

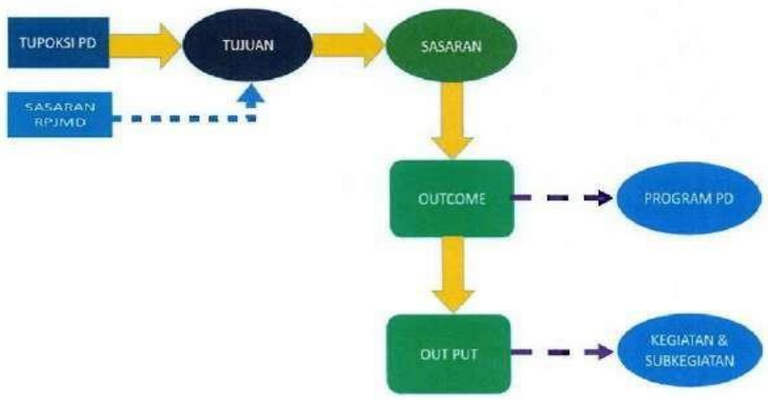


**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.922.511.491,13 | | 2.954.990.255,76 | | 2.999.029.098,51 | | 3.060.222.720,75 | | 3.131.981.583,66 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.747.811.491,13 | | 2.778.348.761,32 | | 2.819.755.078,62 | | 2.877.290.708,18 | | 2.944.760.016,21 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 100 | 100 | 100 | 2.747.811.491,13 | 100 | 2.778.348.761,32 | 100 | 2.819.755.078,62 | 100 | 2.877.290.708,18 | 100 | 2.944.760.016,21 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 23.000.000 | | 23.255.606,04 | | 23.602.189,2 | | 24.083.779,5 | | 24.648.517,7 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 23.000.000 | 100 | 23.255.606,04 | 100 | 23.602.189,2 | 100 | 24.083.779,5 | 100 | 24.648.517,7 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 58.700.000 | | 59.352.351 | | 60.236.891,6 | | 61.465.993,9 | | 62.907.304 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 58.700.000 | 100 | 59.352.351 | 100 | 60.236.891,6 | 100 | 61.465.993,9 | 100 | 62.907.304 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 28.600.000 | | 28.917.840,55 | | 29.348.809,23 | | 29.947.656,35 | | 30.649.896 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 28.600.000 | 100 | 28.917.840,55 | 100 | 29.348.809,23 | 100 | 29.947.656,35 | 100 | 30.649.896 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 54.400.000 | | 55.004.563,85 | | 55.824.308,46 | | 56.963.374,31 | | 58.299.102,9 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 54.400.000 | 100 | 55.004.563,85 | 100 | 55.824.308,46 | 100 | 56.963.374,31 | 100 | 58.299.102,9 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 10.000.000 | | 10.111.133 | | 10.261.821,4 | | 10.471.208,51 | | 10.716.746,85 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.111.133 | 100 | 10.261.821,4 | 100 | 10.471.208,51 | 100 | 10.716.746,85 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2922511491.13 | | 2954990255.76 | | 2999029098.51 | | 3060222720.75 | | 3131981583.66 | |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan

BANYUANYAR adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk menunjang kinerja pelayanan publik kecamatan serta menjalankan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Banyuanyar, maka dapat dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Banyuanyar dijelaskan pada pada tabel 4.2 dibawah ini :

**TABEL 4.2**

Rumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Banyuanyar

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Banyuanyar** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaa dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | terwujudnya peningkatan taraf hidup pekonomian masyarakat di desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga baik secara kesehatan, sosial, dan lingkungan di tingkat pedesaan/kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | terwujudnya peningkatan taraf hidup pekonomian masyarakat di desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga baik secara kesehatan, sosial, dan lingkungan di tingkat pedesaan/kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan **penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah**, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.922.511.491,13 | | 2.954.990.255,76 | | 2.999.029.098,51 | | 3.060.222.720,75 | | 3.131.981.583,66 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.747.811.491,13 | | 2.778.348.761,32 | | 2.819.755.078,62 | | 2.877.290.708,18 | | 2.944.760.016,21 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 100 | 100 | 2.747.811.491,13 | 100 | 2.778.348.761,32 | 100 | 2.819.755.078,62 | 100 | 2.877.290.708,18 | 100 | 2.944.760.016,21 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Banyuanyar | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3.630.000 | | 3.993.000 | | 4.392.300 | | 4.831.530 | | 5.314.683 | | |
| Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 3.630.000 | 2 | 3.993.000 | 2 | 4.392.300 | 2 | 4.831.530 | 2 | 5.314.683 | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1.100.000 | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 1.100.000 | 2 | 1.210.000 | 2 | 1.331.000 | 2 | 1.464.100 | 2 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1.100.000 | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 2 | 1.100.000 | 2 | 1.210.000 | 2 | 1.331.000 | 2 | 1.464.100 | 2 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.430.000 | | 1.573.000 | | 1.730.300 | | 1.903.330 | | 2.093.663 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 1.430.000 | 12 | 1.573.000 | 12 | 1.730.300 | 12 | 1.903.330 | 12 | 2.093.663 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.418.960.300,13 | | 2.416.612.451,32 | | 2.421.845.137,62 | | 2.439.589.773,18 | | 2.463.288.989,21 | | |
| Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 15 | 15 | 2.418.960.300,13 | 15 | 2.416.612.451,32 | 15 | 2.421.845.137,62 | 15 | 2.439.589.773,18 | 15 | 2.463.288.989,21 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.383.879.100,13 | | 2.378.023.131,32 | | 2.379.396.885,62 | | 2.392.896.696,18 | | 2.411.926.604,21 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 15 | 15 | 2.383.879.100,13 | 15 | 2.378.023.131,32 | 15 | 2.379.396.885,62 | 15 | 2.392.896.696,18 | 15 | 2.411.926.604,21 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 32.221.200 | | 35.443.320 | | 38.987.652 | | 42.886.417 | | 47.175.059 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 32.221.200 | 12 | 35.443.320 | 12 | 38.987.652 | 12 | 42.886.417 | 12 | 47.175.059 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1.100.000 | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 2 | 1.100.000 | 2 | 1.210.000 | 2 | 1.331.000 | 2 | 1.464.100 | 2 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 880.000 | | 968.000 | | 1.064.800 | | 1.171.280 | | 1.288.408 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 880.000 | 12 | 968.000 | 12 | 1.064.800 | 12 | 1.171.280 | 12 | 1.288.408 | | |
| 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 880.000 | | 968.000 | | 1.064.800 | | 1.171.280 | | 1.288.408 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 2 | 880.000 | 2 | 968.000 | 2 | 1.064.800 | 2 | 1.171.280 | 2 | 1.288.408 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 59.695.900 | | 65.665.490 | | 72.232.039 | | 79.455.243 | | 87.400.767 | | |
| Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 4 | 4 | 59.695.900 | 4 | 65.665.490 | 4 | 72.232.039 | 4 | 79.455.243 | 4 | 87.400.767 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.730.100 | | 4.103.110 | | 4.513.421 | | 4.964.763 | | 5.461.239 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 3.730.100 | 12 | 4.103.110 | 12 | 4.513.421 | 12 | 4.964.763 | 12 | 5.461.239 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.400.000 | | 4.840.000 | | 5.324.000 | | 5.856.400 | | 6.442.040 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 4.400.000 | 12 | 4.840.000 | 12 | 5.324.000 | 12 | 5.856.400 | 12 | 6.442.040 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 2.610.300 | | 2.871.330 | | 3.158.463 | | 3.474.309 | | 3.821.740 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 2.610.300 | 12 | 2.871.330 | 12 | 3.158.463 | 12 | 3.474.309 | 12 | 3.821.740 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 38.769.500 | | 42.646.450 | | 46.911.095 | | 51.602.205 | | 56.762.425 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 38.769.500 | 12 | 42.646.450 | 12 | 46.911.095 | 12 | 51.602.205 | 12 | 56.762.425 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 9.086.000 | | 9.994.600 | | 10.994.060 | | 12.093.466 | | 13.302.813 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 9.086.000 | 12 | 9.994.600 | 12 | 10.994.060 | 12 | 12.093.466 | 12 | 13.302.813 | | |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.100.000 | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 4 | 4 | 1.100.000 | 4 | 1.210.000 | 4 | 1.331.000 | 4 | 1.464.100 | 4 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 56.417.680 | | 62.059.448 | | 68.265.393 | | 75.091.932 | | 82.601.125 | | |
| Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | 4 | 56.417.680 | 4 | 62.059.448 | 4 | 68.265.393 | 4 | 75.091.932 | 4 | 82.601.125 | | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 22.000.000 | | 24.200.000 | | 26.620.000 | | 29.282.000 | | 32.210.200 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | 4 | 22.000.000 | 4 | 24.200.000 | 4 | 26.620.000 | 4 | 29.282.000 | 4 | 32.210.200 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 34.417.680 | | 37.859.448 | | 41.645.393 | | 45.809.932 | | 50.390.925 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | 4 | 34.417.680 | 4 | 37.859.448 | 4 | 41.645.393 | 4 | 45.809.932 | 4 | 50.390.925 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 181.420.611 | | 199.562.672 | | 219.518.939 | | 241.470.833 | | 265.617.915 | | |
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 181.420.611 | 12 | 199.562.672 | 12 | 219.518.939 | 12 | 241.470.833 | 12 | 265.617.915 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 8.507.620 | | 9.358.382 | | 10.294.220 | | 11.323.642 | | 12.456.006 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 12 | 8.507.620 | 12 | 9.358.382 | 12 | 10.294.220 | 12 | 11.323.642 | 12 | 12.456.006 | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 21.159.600 | | 23.275.560 | | 25.603.116 | | 28.163.428 | | 30.979.770 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 21.159.600 | 12 | 23.275.560 | 12 | 25.603.116 | 12 | 28.163.428 | 12 | 30.979.770 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.003.000 | | 3.303.300 | | 3.633.630 | | 3.996.993 | | 4.396.692 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 3.003.000 | 12 | 3.303.300 | 12 | 3.633.630 | 12 | 3.996.993 | 12 | 4.396.692 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 148.750.391 | | 163.625.430 | | 179.987.973 | | 197.986.770 | | 217.785.447 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 148.750.391 | 12 | 163.625.430 | 12 | 179.987.973 | 12 | 197.986.770 | 12 | 217.785.447 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 27.687.000 | | 30.455.700 | | 33.501.270 | | 36.851.397 | | 40.536.537 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12 | 12 | 27.687.000 | 12 | 30.455.700 | 12 | 33.501.270 | 12 | 36.851.397 | 12 | 40.536.537 | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 27.687.000 | | 30.455.700 | | 33.501.270 | | 36.851.397 | | 40.536.537 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12 | 12 | 27.687.000 | 12 | 30.455.700 | 12 | 33.501.270 | 12 | 36.851.397 | 12 | 40.536.537 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 23.000.000 | | 23.255.606,04 | | 23.602.189,2 | | 24.083.779,5 | | 24.648.517,7 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 23.000.000 | 100 | 23.255.606,04 | 100 | 23.602.189,2 | 100 | 24.083.779,5 | 100 | 24.648.517,7 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Banyuanyar | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 15.960.000 | | 15.511.606,04 | | 15.083.789,2 | | 14.713.539,5 | | 14.341.253,7 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik selama satu tahun | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 9 | 9 | 15.960.000 | 9 | 15.511.606,04 | 9 | 15.083.789,2 | 9 | 14.713.539,5 | 9 | 14.341.253,7 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 15.960.000 | | 15.511.606,04 | | 15.083.789,2 | | 14.713.539,5 | | 14.341.253,7 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 9 | 9 | 15.960.000 | 9 | 15.511.606,04 | 9 | 15.083.789,2 | 9 | 14.713.539,5 | 9 | 14.341.253,7 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 7.040.000 | | 7.744.000 | | 8.518.400 | | 9.370.240 | | 10.307.264 | | |
| Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | 7.040.000 | 6 | 7.744.000 | 6 | 8.518.400 | 6 | 9.370.240 | 6 | 10.307.264 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 7.040.000 | | 7.744.000 | | 8.518.400 | | 9.370.240 | | 10.307.264 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | 7.040.000 | 6 | 7.744.000 | 6 | 8.518.400 | 6 | 9.370.240 | 6 | 10.307.264 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 58.700.000 | | 59.352.351 | | 60.236.891,6 | | 61.465.993,9 | | 62.907.304 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 58.700.000 | 100 | 59.352.351 | 100 | 60.236.891,6 | 100 | 61.465.993,9 | 100 | 62.907.304 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Banyuanyar | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 44.700.000 | | 44.352.351 | | 44.200.000 | | 42.200.000 | | 41.500.000 | | |
| terwujudnya peningkatan taraf hidup pekonomian masyarakat di desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 3 | 3 | 44.700.000 | 3 | 44.352.351 | 3 | 44.200.000 | 3 | 42.200.000 | 3 | 41.500.000 | | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 14.000.000 | | 13.000.000 | | 12.000.000 | | 11.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 8 | 8 | 14.000.000 | 8 | 13.000.000 | 8 | 12.000.000 | 8 | 11.000.000 | 8 | 10.000.000 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 30.700.000 | | 31.352.351 | | 32.200.000 | | 31.200.000 | | 31.500.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 3 | 3 | 30.700.000 | 3 | 31.352.351 | 3 | 32.200.000 | 3 | 31.200.000 | 3 | 31.500.000 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 14.000.000 | | 15.000.000 | | 16.036.891,6 | | 19.265.993,9 | | 21.407.304 | | |
| terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga baik secara kesehatan, sosial, dan lingkungan di tingkat pedesaan/kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 350 | 350 | 14.000.000 | 350 | 15.000.000 | 350 | 16.036.891,6 | 350 | 19.265.993,9 | 350 | 21.407.304 | | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 350 | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 7.000.000 | | 7.500.000 | | 8.036.891 | | 10.765.993 | | 12.407.304 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 350 | 350 | 7.000.000 | 350 | 7.500.000 | 350 | 8.036.891 | 350 | 10.765.993 | 350 | 12.407.304 | | |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 7.000.000 | | 7.500.000 | | 8.000.000,6 | | 8.500.000,9 | | 9.000.000 | | |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 350 | 350 | 7.000.000 | 350 | 7.500.000 | 350 | 8.000.000,6 | 350 | 8.500.000,9 | 350 | 9.000.000 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 28.600.000 | | 28.917.840,55 | | 29.348.809,23 | | 29.947.656,35 | | 30.649.896 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 28.600.000 | 100 | 28.917.840,55 | 100 | 29.348.809,23 | 100 | 29.947.656,35 | 100 | 30.649.896 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Banyuanyar | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 28.600.000 | | 28.917.840,55 | | 29.348.809,23 | | 29.947.656,35 | | 30.649.896 | | |
| terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 14 | 14 | 28.600.000 | 14 | 28.917.840,55 | 14 | 29.348.809,23 | 14 | 29.947.656,35 | 14 | 30.649.896 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 28.600.000 | | 28.917.840,55 | | 29.348.809,23 | | 29.947.656,35 | | 30.649.896 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 14 | 14 | 28.600.000 | 14 | 28.917.840,55 | 14 | 29.348.809,23 | 14 | 29.947.656,35 | 14 | 30.649.896 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 54.400.000 | | 55.004.563,85 | | 55.824.308,46 | | 56.963.374,31 | | 58.299.102,9 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 54.400.000 | 100 | 55.004.563,85 | 100 | 55.824.308,46 | 100 | 56.963.374,31 | 100 | 58.299.102,9 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Banyuanyar | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 54.400.000 | | 55.004.563,85 | | 55.824.308,46 | | 56.963.374,31 | | 58.299.102,9 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.605 | 1.605 | 54.400.000 | 1.605 | 55.004.563,85 | 1.605 | 55.824.308,46 | 1.605 | 56.963.374,31 | 1.605 | 58.299.102,9 | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 54.400.000 | | 55.004.563,85 | | 55.824.308,46 | | 56.963.374,31 | | 58.299.102,9 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.605 | 1.605 | 54.400.000 | 1.605 | 55.004.563,85 | 1.605 | 55.824.308,46 | 1.605 | 56.963.374,31 | 1.605 | 58.299.102,9 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 10.000.000 | | 10.111.133 | | 10.261.821,4 | | 10.471.208,51 | | 10.716.746,85 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.111.133 | 100 | 10.261.821,4 | 100 | 10.471.208,51 | 100 | 10.716.746,85 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Banyuanyar | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 10.000.000 | | 10.111.133 | | 10.261.821,4 | | 10.471.208,51 | | 10.716.746,85 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.111.133 | 2 | 10.261.821,4 | 2 | 10.471.208,51 | 2 | 10.716.746,85 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 3.000.000 | | 3.500.000 | | 4.000.000 | | 4.500.000 | | 5.000.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.500.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.500.000 | 2 | 5.000.000 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 7.000.000 | | 6.611.133 | | 6.261.821,4 | | 5.971.208,51 | | 5.716.746,85 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 7.000.000 | 2 | 6.611.133 | 2 | 6.261.821,4 | 2 | 5.971.208,51 | 2 | 5.716.746,85 | | |

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah yang tertuang dalam Lampiran Perda RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Nomor 5 Tahun 2025 Bab 3 tentang Program Prioritas RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 halaman III/83 di Misi 1 SAE PEMERINTAHAN Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif dengan Program Prioritas 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK. Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4

Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Banyuanyar** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |

dikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banyuanyar sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banyuanyar

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Banyuanyar | | | | | | | | | |
| 2. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 74,48 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
| 3. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 98,94 | 99,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)** adalah **ukuran keberhasilan yang bersifat operasional** dan digunakan untuk menilai capaian **kinerja kegiatan atau sub kegiatan** dalam rangka mendukung pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** perangkat daerah. **Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Banyuanyar** sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.6 dibawah ini

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Banyuanyar

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | NIHIL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## BAB V PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan BANYUANYAR.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan BANYUANYAR.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, September 2025 **Camat**
**BANYUANYAR**

**HUDAN KURNIAWAN,S.H,M.Si**
**Pembina**
**NIP. 197504292002121005**

# RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN BESUK

TAHUN 2025

# KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, rnarilah kita bersarna-sarna tetap rnelaksanakan amanah dalam bidang tugas kita maslng-maslng bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai. Rencana Strategis Kecamatan Besuk Tahun 2025-2029 disusun untuk rnemberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecarnatan Besuk Kabupaten Probolinggo tahun 2025–2029 ini rnengacu pada visi, misi dan program Bupati Probolinggo yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan sernoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, September 2025

**CAMAT BESUK**

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN BESUK

**ABDUL BARI, SH. M.Si**
**Pembina**
**NIP. 196908161992021003**

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **2**
**BAB I** ..... 4
**PENDAHULUAN** ..... 4
**1.1 Latar Belakang** ..... 4
**1.2 Dasar Hukum Penyusunan** ..... 5
**1.3 Maksud dan Tujuan** ..... 7
**1.4 Sistematika Penulisan** ..... 8
**BAB II** ..... 9
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN** ..... 9
**DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** ..... 9
**2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Besuk** ..... 9
**2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** ..... 22
**BAB III** ..... 26
**TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... 26
**3.1 Tujuan Renstra Kecamatan BesukTahun 2025-2029** ..... 26
**3.2 Sasaran Renstra Kecamatan BesukTahun 2025-2029** ..... 26
**3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan BesukTahun 2025-2029** ..... 31
**3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan BesukTahun 2025-2029** ..... 32
**BAB IV** ..... 34
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** ..... 34
**4.1 Uraian Program** ..... 34
**4.2 Uraian Kegiatan** ..... 35
**BAB V** ..... 49
**PENUTUP** ..... 49

# DAFTAR TABEL

*Tabel 2.1.b.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Besuk Berdasarkan pangkat dan Golongan tahun 2025*

*Tabel 2.1.b.2 Jumlah Sarana Prsasarana Kecamatan Besuk Tahun 2025*

*Tabel 2.1.c Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Besuk*

*Tabel 2.2 Isu Strategis Kecamatan Besuk*

*Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis (Renstra)*

*Table 3.5 Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) dan Pendanaan*

*Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukum Program Prioritas Pembangunan Daerah*

*Table 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah*

*Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci*

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan BesukKabupaten Probolinggo yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan BesukTahun 2025 - 2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Besuk yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Besuk yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Besuk sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Besuk juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Probolinggo, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

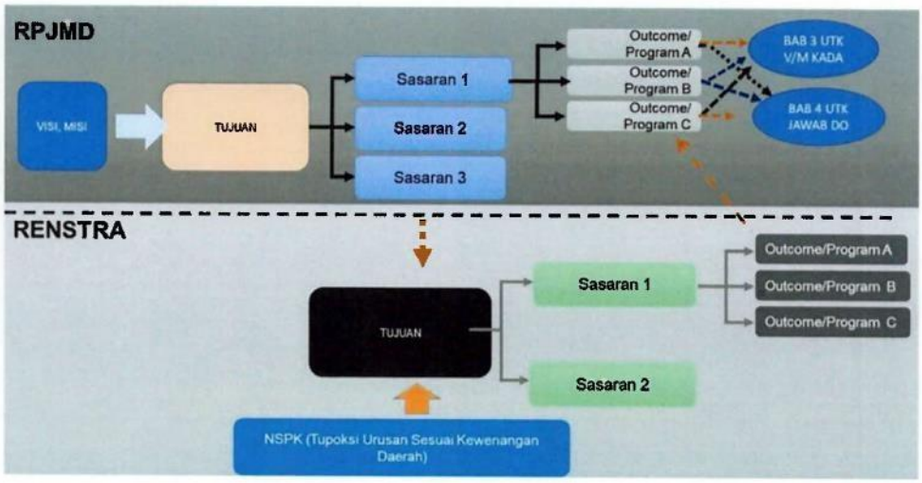


Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Besuk yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Probolinggo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Besuk. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Besuk dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan ke Tiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentangf Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2024-2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 1 Seri D;
36. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo;
37. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 19 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Besuk Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan BesukTahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Besuk ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Besuk sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Besuk

### a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Besuk

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatnnya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan Besuk

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan tentang Kedudukan Kabupaten Probolinggo, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Besuk :

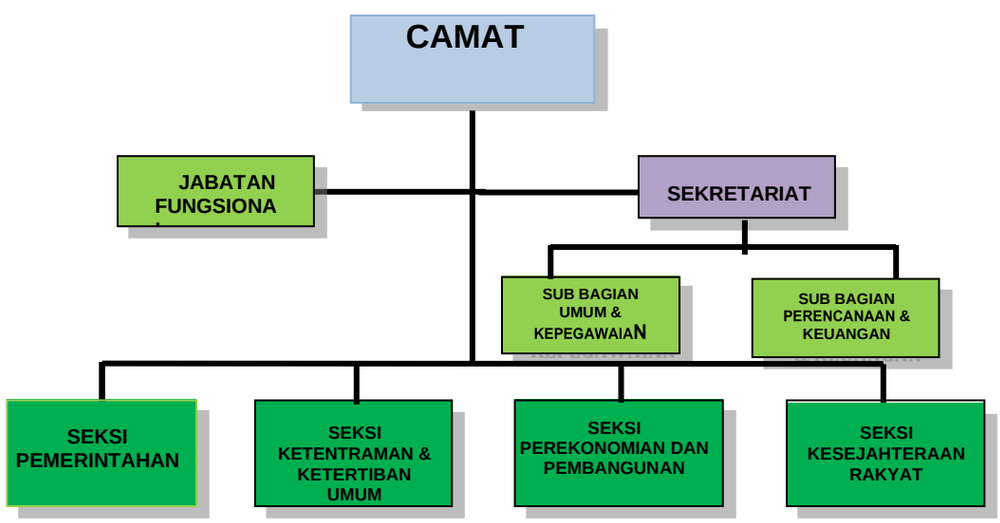

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Besuk Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

(1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;

b. pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;

c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

(1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;

b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;

c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;

d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;

e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;

f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);

g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;

h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai**

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :

a. pelaksanaan urusan administrasi umum;

b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;

c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;

d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;

e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran,

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d. pengelolaan urusan administrasi keuangan; pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. Kepala Seksi Pemerintahan**

(1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

(1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

b. persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

c. persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

d. pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata.

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

(1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi

dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;

e. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

8. **Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat**

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat.
(2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. Kelompok Jabatan Fungsional**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan.
(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Besuk

Struktur Organisasi Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat.
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Berikut merupakan data pegawai Kecamatan BesukTahun 2025 tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.b.1
Data Pegawai Kecamatan Besuk

| No | Uraian | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| I | Pegawai PNS | 13 | - | 13 |
| II | Pegawai CPNS | - | - | - |
| III | Pegawai PPPK | - | - | - |
| IV | Non PNS | 6 | 4 | 10 |
| V | Tingkat Pendidikan CPNS dan PNS : | | | |
| | 1. SLTA | 6 | - | 6 |
| | 2. D-3 | - | - | - |
| | 3. D-4 | - | - | - |
| | 4. S1 | 2 | - | 2 |
| | 5. S2 | 4 | - | 4 |
| VI | Golongan Kepangkatan CPNS dan PNS: | | | |
| | 1. II a | - | - | - |
| | 2. II b | - | - | - |
| | 3. II c | 1 | - | 1 |
| | 1. II d | 6 | - | 6 |
| | 2. III a | - | - | - |
| | 3. III b | 1 | - | 1 |
| | 4. III c | - | - | - |
| | 5. III d | 4 | - | 4 |
| | 9. IV a | 1 | - | 1 |
| | 10. IV b | - | - | 1 |
| VII | Golongan PPPK: | - | - | - |
| | | - | - | - |
| V | Agama: | | | |
| | Islam | 19 | 4 | 23 |
| | Katolik | - | - | - |
| | Budha | - | - | - |
| | Hindu | - | - | - |
| | Lainnya | - | - | - |
| VI | Pejabat struktural | - | - | - |
| VII | Fungsional umum/Staf | - | - | - |

Sumber data: Kecamatan Besuk 2025

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Besuk terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Besuk Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Jalan Raya Besuk No. 92 Besuk Kabupaten Probolinggo. Berikut merupakan sarana dan prasarana Kecamatan Besuk :

Tabel 2.1.b.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Besuk

| NO. | URAIAN SARPRAS | JUMLAH | SATUAN |
|---|---|---|---|
| **Sarana** | | | |
| 1 | Mobil Dinas | 1 | Unit |
| 2 | Sepeda Motor Axelo | 1 | Unit |
| 3 | Sepeda Motor Suzuki 110 | 4 | Unit |
| 4 | Sepeda Motor Suzuki 100 | 1 | Unit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Lemari Besi / Metal | 2 | Buah |
| 6 | Finger Print | 1 | Unit |
| 7 | Genset | 1 | Unit |
| 8 | Lemari Arsip | 5 | Buah |
| 9 | AC | 4 | Unit |
| 10 | Televisi | 1 | Unit |
| 11 | Sound System | 1 | Unit |
| 12 | Papan Pembatas ruangan | 7 | Unit |
| 13 | CCTV | 1 | Unit |
| 14 | Interaktive Dispaly | 1 | Unit |
| 15 | LCD Prjector | 2 | Unit |
| 16 | Lemari Kayu | 3 | Buah |
| 17 | Kursi Tamu | 6 | Buah |
| 18 | Kursi Pelayanan | 4 | Buah |
| 19 | Kursi Tunggu | 2 | Buah |
| 20 | Kursi Rapat | 50 | Buah |
| 21 | Meja Kerja Kayu | 21 | Buah |
| 22 | Kasur / Springbed | 1 | Buah |
| 23 | Lemari Es | 1 | Buah |
| 24 | Sanyo Air | 2 | Unit |
| 25 | Top Speaker | 1 | Unit |
| 26 | Power Fan | 6 | Unit |
| 27 | Alat Pemadam / Portable | 1 | Unit |
| 28 | Meja tulis | 10 | Buah |
| 29 | Rak / Credenza | 1 | Buah |
| 30 | Meja Pelayanan | 1 | Buah |
| 31 | Meja Kerja Pejabat Eselon | 7 | Buah |
| 32 | Meja Kerja Pelaksana | 7 | Buah |
| 33 | Meja Rapat | 7 | Buah |
| 34 | Kursi rapat pejabat | 4 | Buah |
| 35 | Kursi kerja pelaksana | 10 | Buah |
| 36 | Kursi kerja pejabat eselon IV | 8 | Buah |
| 37 | Kamera Digital | 2 | Unit |
| 38 | Audio Mixing Portable | 1 | Unit |
| 39 | Wireless Audio Conference | 1 | Unit |
| 40 | Web Camera Conference | 1 | Unit |
| 41 | Loudspeaker | 2 | Unit |
| 42 | Tablet | 1 | Unit |
| 43 | Kursi dorong | 1 | Buah |
| 44 | PC Unit | 10 | Unit |
| 45 | Laptop | 12 | Unit |
| 46 | Note Book | 7 | Unit |
| 47 | Onboard Computer (OPS) | 1 | Unit |
| 48 | Printer | 5 | Unit |
| 49 | Scanner | 2 | Unit |
| 50 | Barcorde Scanner | 1 | Unit |
| 51 | Meja Podium | 1 | Buah |
| 52 | Pendopo | 1 | Unit |
| 53 | Gedung Kantor | 1 | Unit |
| 54 | Rumah Dinas | 1 | Unit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prasarana** | | | |
| 1 | Internet | 2 | Unit |
| 2 | Instalasi Listrik | 10.400 w | VA |

**c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Besuk**

Kecamatan Besuk menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Besuk dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **baik** dengan **rasio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Besuk berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 80,13 (2021) menjadi 84,28 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2022.
- **Persentase pelayanan publik sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 80% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator **nilai SAKIP** dan **reformasi birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian NA di Tahun 2024 yaitu 72,21, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data perbandingan antara realisasi dan capaian berbasis kinerja dengan realisasi dan capaian berbasis Anggaran di dalam Indikator kinerja (IKU) kecamatan Besuk yaitu:

- IKU Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas dengan target 100%, capaian kinerja 84,28% dengan capaian realisasi anggaran 99,71% dengan tingkat efisiensi -15,73% kategori belum efisien.
- IKU Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi target 100%,

capaian kinerja 99% dengan capaian realisasi anggaran 99,75% dengan tingkat efisiensi -0,75% kategori belum efisien.

- IKU Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan target 100%, capaian kinerja 95% dengan capaian realisasi anggaran 99,80% dengan tingkat efisiensi -4,8% kategori belum efisien
- IKU Persentase desa/kelurahan yang telah dibina target 100%, capaian kinerja 90% dengan capaian realisasi anggaran 0% dengan tingkat efisiensi 90% kategori efisien**,** kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan tugas - tugas pelimpahan yang dilaksanakan oleh kecamatan
- IKU Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah target 0,5%, realisasi dan capaian nilai AKIP Tahun 2024 oleh APIP di Bulan Maret 2025 yaitu 72,21.

  Secara keseluruhan, Kecamatan Besuk menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

**Tabel 2.1.1.c**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Besuk**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | SPM | Target Indikator Lainnya | Realisasi 2020 | Target Renstra perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | | | | | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 81,96% | 84,73% | 84,28 % | 0,75% | 0,82% | 0,85% | 0,84% | 5,7% | 81% |
| 2 | Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan | | | | | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 86.91% | 93,4% | 95% | 0,92% | 0,87% | 0,93% | 0,95% | 8,9% | 90% |
| 3 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | | | | | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 95% | 99% | 99,75% | 0,92% | 0,95% | 0,99% | 1% | 2,10% | 93% |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | | | | | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0,90% | 0% | 0% |
| 5 | Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah | | | | | 71,24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71,95 | 71,15 | 71,71 | 72,21 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 2,5% | 71 |

Kecamatan Besuk menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai mendekati target, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 84,28, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, , umumnya berkinerja "**Baik"**. Kecamatan Besuk telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

**d. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Besuk**

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana

organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Besuk dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.2
## Isu Strategis Kecamatan Besuk

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Potensi Pertanian dan Perkebunan | Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan Publik | Terdapatnya lahan yang terkontaminasi oleh Limbah B3 kegiatan Industri besar di sekitar sungai besar | Desentralisasi dan Otonomi Daerah | Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan | Keterbatasan Kewenangan Kecamatan | Belum Optimalnya Penyelanggaraan Pelayanan Kecamatan |
| Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa | Terdapat lahan terkotaminasi Limbah B3 yang harus dipulihkan lokasinya di Desa Besuk, Pesisir, Pajurangan, Curah Sawo Randu Pitu Kecamatan Besuk | Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal | Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan | Disparitas Antar Wilayah | Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa |
| Potensi Wisata | | Adanya lahan terkontaminasi Limbah B3 di Kecamatan Besuk. | Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan | Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor | Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten | |
| Potensi Sumber Daya Manusia | | Pembuangan Limbah B3 Industri besar (PT Sasa Inti) di Kecamatan Besuk | Digitalisasi dan Pelayanan Publik | Pelayanan Publik yang Belum Optimal | Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu | |
| Potensi Desa Wisata dan Agrowisata | | Terdapat lahan bekas galian C bekas Tol yang belum di fungsikan sehingga menjadi genangan air saat musim penghujan | Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis | Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi | Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan untuk mewujudkan swasembada pangan Nasional | | Adanya banjir yang terjadi di Kecamatan Besuk pada Desa Pajurangan, Curah Sawo, Besuk, Pesisir dan Randu Pitu | Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan | Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan | Lemahnya Implementasi e-Government | |
| | | Layanan pencegahan proteksi kebakaran belum dilakukan dengan optimal di Kecamatan Besuk, | Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat | Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial | Partisipasi Masyarakat dan Transparansi | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adanya bangunan liar di Kecamatan Besuk | | Penanganan Konflik Sosial dan Bencana | | |
| | | Masih adanya kasus stunting di Kecamatan Besuk | | | | |
| | | Rendahnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di Besuk | | | | |
| | | Menurunnya nilai wawasan kebangsaan generasi muda (di seluruh Kabupaten Probolinggo). | | | | |

# BAB III
# TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Besuk Tahun 2025 - 2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Besuk Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan Besuk menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***. Tujuan tersebut selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: "***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Besuk, dalam hal ini Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Besuk Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Besuk menetapkan sasaran strategi ”Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Besuk tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Besuk

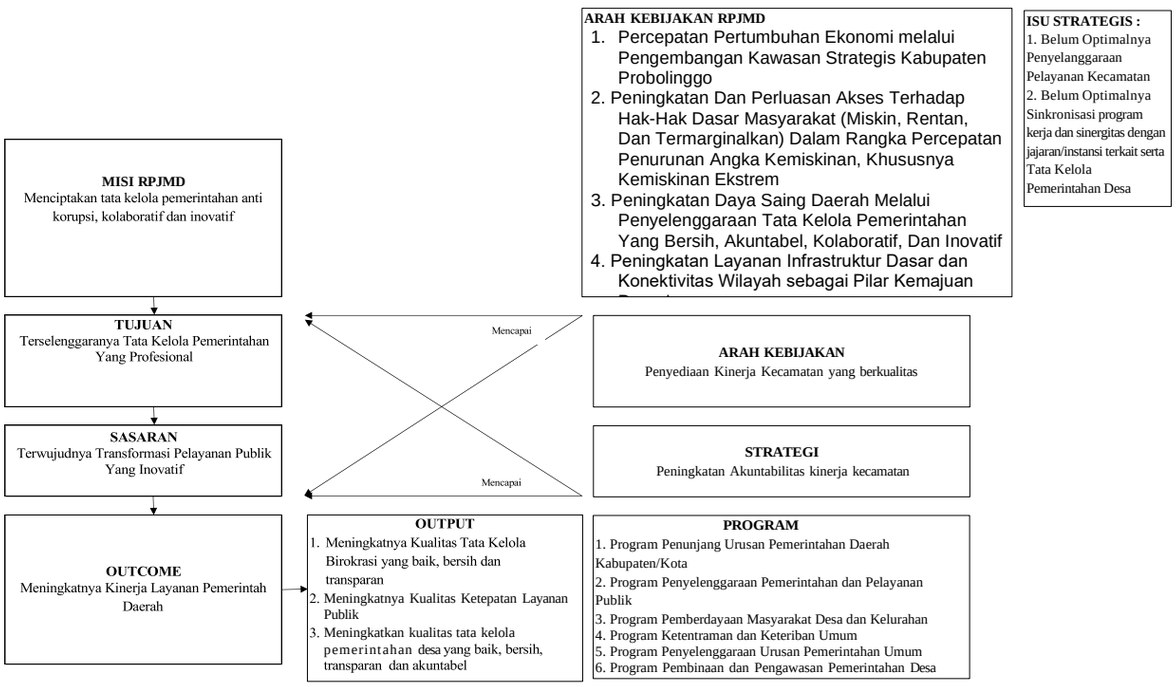


RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Besuk yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah

3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

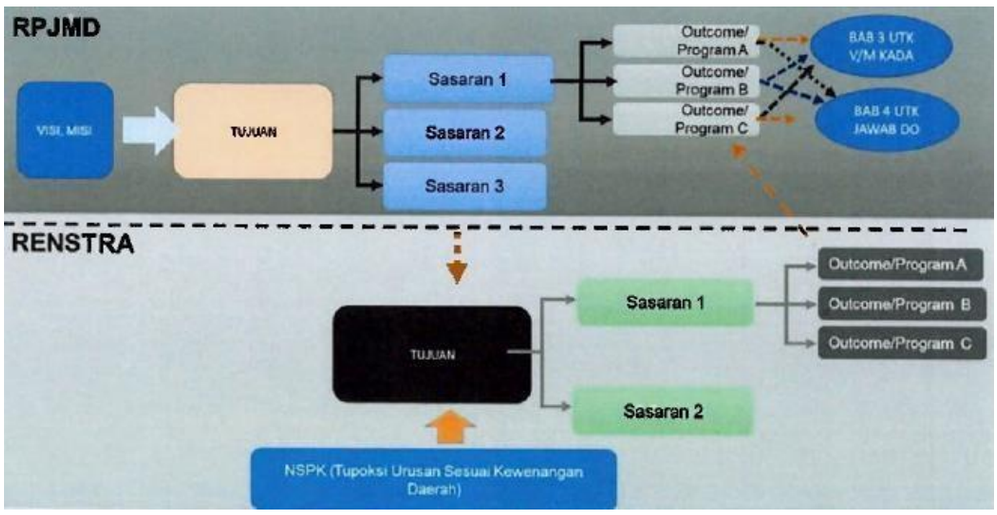


## 3.3 Tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra)

**Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Besuk** adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. **Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :**

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (**Specific**, **Measurable**, **Achievable, Relevant, Time-bound**) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Besuk dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Besuk

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,05 | 90 | 91 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 72,6 | 72,63 | 72,67 | 72,71 | 72,74 | 72,78 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara berkualitas (%) | 83,38 | 84,21 | 85,05 | 85,9 | 86,76 | 87,63 | Nilai SKM e SUKMA Prop Jatim |

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Serta memperhatikan Devinisi Operasional sudah ditetapkan dengan perhitungan rumus yang telah ditentukan

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisataberbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.3. Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VISI : **TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO SAE, SEJAHTERA, AMANAH RELIGIUS SERTA EXSIS BERDAYA SAING** | | | | |
| MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif | | | | |
| **TUJUAN / INDIKATOR** | **SASARAN / INDIKATOR** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan` | 1<br><br><br><br>2 | Penguatan Sistem Perencanaan dan pengukuran Kinerja<br><br>Peningkatan Kapasitas |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten | Indikator :<br>Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah<br>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan | | | SDM Aparatur Kecamatan |
| | | | 3 | Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| | | | 4 | Transparansi dan Pelibatan Publik |
| | | | 5 | Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan kecamatan | 1 | Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik |
| | | | 2 | Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi |
| | | | 3 | Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting |
| | | | 4 | Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran |
| | | | 5 | Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat |
| | | Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat di kecamatan | 1 | Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses |
| | | | 2 | Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan |
| | | | 3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan |
| | | | 4 | Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik |
| | | | 5 | Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas |

## 3.4 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan BesukTahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

**Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Besuk** sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. **Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Besuk:**

1. Meningkatkan **ketepatan sasaran** program/kegiatan.
2. Mempermudah **koordinasi antarperangkat daerah**.
3. Mendukung **pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah**.
4. Menunjang **penggunaan sistem informasi pembangunan daerah**.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik) | Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik) | Permberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat) | Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes) | Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat) |

## 3.5 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Besuk Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Besuk sebagai berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Besuk

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN ) | 1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Probolinggo<br>2. Peningkatan Dan Perluasan Akses Terhadap Hak-Hak Dasar Masyarakat (Miskin, Rentan, Dan Termarginalkan) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan, Khususnya Kemiskinan Ekstrem<br>3. Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Kolaboratif, Dan Inovatif<br>4. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah sebagai Pilar Kemajuan Daerah | 1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan<br>2. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja<br>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi<br>4. Transparansi dan Pelibatan Publik<br>5. Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten<br>6. Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik<br>7. Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi<br>8. Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting<br>9. Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran<br>10. Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat<br>11. Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah diakses<br>12. Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan | |
| 2 | Mempercepat Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata (SAE INFRASTRUKTUR) | | | |
| 3 | Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan (SAE EKONOMI) Peningkatan kemandirian Masyarakat Miskin | | | |
| 4 | Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau (SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN) | | | |
| 5 | Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas (SAE SOSIAL) | | | |

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Besuk ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Besuk adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam memberdayakan kelompok – kelompok masyarakat desa dan kelurahan untuk wujudkan peningkatan pendidikan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang adil , merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat pedesaan dan kelurahan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkuan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan sebagai sarana komunikasi serta menampung aspirasi dan permasalahan dimasyarakat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Besukmerupakan **Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya**, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Besuk juga merupakan proses strategis yang harus **terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah**. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Besuk serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Besuk dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Besuk

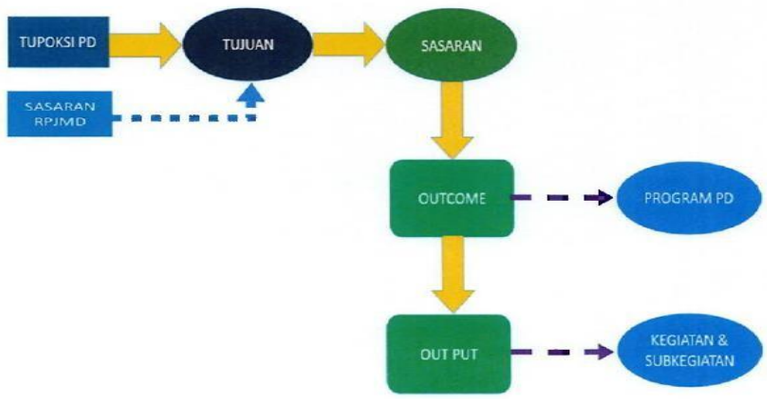


**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 3.011.843.184,48 | | 3.045.314.720,14 | | 3.090.699.686,64 | | 3.153.763.800,17 | | 3.227.716.097,78 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.802.865.984,48 | | 2.834.015.092,11 | | 2.876.251.016,47 | | 2.934.939.416,13 | | 3.003.760.523,07 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 100 | 100 | 100 | 2.802.865.984,48 | 100 | 2.834.015.092,11 | 100 | 2.876.251.016,47 | 100 | 2.934.939.416,13 | 100 | 3.003.760.523,07 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 36.000.000 | | 36.400.079,02 | | 36.942.557,07 | | 37.696.350,65 | | 38.580.288,69 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 36.000.000 | 100 | 36.400.079,02 | 100 | 36.942.557,07 | 100 | 37.696.350,65 | 100 | 38.580.288,69 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 38.000.000 | | 38.422.305,63 | | 38.994.921,35 | | 39.790.592,35 | | 40.723.638,06 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 38.000.000 | 100 | 38.422.305,63 | 100 | 38.994.921,35 | 100 | 39.790.592,35 | 100 | 40.723.638,06 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 64.253.200 | | 64.967.265,47 | | 65.935.486,33 | | 67.280.865,49 | | 68.858.527,91 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 64.253.200 | 100 | 64.967.265,47 | 100 | 65.935.486,33 | 100 | 67.280.865,49 | 100 | 68.858.527,91 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 67.724.000 | | 68.476.638 | | 69.497.159 | | 70.915.213 | | 72.578.096 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 67.724.000 | 100 | 68.476.638 | 100 | 69.497.159 | 100 | 70.915.213 | 100 | 72.578.096 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 3.000.000 | | 3.033.339,91 | | 3.078.546,42 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | 100 | 100 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.033.339,91 | 100 | 3.078.546,42 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.215.024,05 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 3011843184.48 | | 3045314720.14 | | 3090699686.64 | | 3153763800.17 | | 3227716097.78 | |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Besukadalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk menunjang kinerja pelayanan publik kecamatan serta menjalankan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Besuk, maka dapat dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Besuk dijelaskan pada pada tabel 4.2 dibawah ini :

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**
**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| **7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Besuk** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Tepat Waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara berkualitas (%) | | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |
| | | | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |
| | | | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan **penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah**, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 3.011.843.184,48 | | 3.045.314.720,14 | | 3.090.699.686,64 | | 3.153.763.800,17 | | 3.227.716.097,78 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.802.865.984,48 | | 2.834.015.092,11 | | 2.876.251.016,47 | | 2.934.939.416,13 | | 3.003.760.523,07 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 100 | 100 | 2.802.865.984,48 | 100 | 2.834.015.092,11 | 100 | 2.876.251.016,47 | 100 | 2.934.939.416,13 | 100 | 3.003.760.523,07 | 7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Besuk | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 15.000.000 | | 16.500.000 | | 18.000.000 | | 19.500.000 | | 21.000.000 | | |
| Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Tepat Waktu | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | 4 | 15.000.000 | 4 | 16.500.000 | 4 | 18.000.000 | 4 | 19.500.000 | 4 | 21.000.000 | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7.000.000 | | 7.500.000 | | 8.000.000 | | 8.500.000 | | 9.000.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 7 | 7.000.000 | 7 | 7.500.000 | 7 | 8.000.000 | 7 | 8.500.000 | 7 | 9.000.000 | | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4.000.000 | | 4.500.000 | | 5.000.000 | | 5.500.000 | | 6.000.000 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.500.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.500.000 | 4 | 6.000.000 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4.000.000 | | 4.500.000 | | 5.000.000 | | 5.500.000 | | 6.000.000 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.500.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.500.000 | 4 | 6.000.000 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.196.198.244,48 | | 2.295.847.352,11 | | 2.336.583.276,47 | | 2.393.771.676,13 | | 2.461.092.783,07 | | |
| Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 12 | 2.196.198.244,48 | 12 | 2.295.847.352,11 | 12 | 2.336.583.276,47 | 12 | 2.393.771.676,13 | 12 | 2.461.092.783,07 | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.142.198.244,48 | | 2.241.847.352,11 | | 2.282.583.276,47 | | 2.339.771.676,13 | | 2.407.092.783,07 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 12 | 2.142.198.244,48 | 12 | 2.241.847.352,11 | 12 | 2.282.583.276,47 | 12 | 2.339.771.676,13 | 12 | 2.407.092.783,07 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 5 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 2 | 2 | 1.000.000 | 2 | 1.000.000 | 2 | 1.000.000 | 2 | 1.000.000 | 2 | 1.000.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 74.500.000 | | 74.500.000 | | 74.500.000 | | 74.500.000 | | 74.500.000 | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 74.500.000 | 12 | 74.500.000 | 12 | 74.500.000 | 12 | 74.500.000 | 12 | 74.500.000 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 7.500.000 | 12 | 7.500.000 | 12 | 7.500.000 | 12 | 7.500.000 | 12 | 7.500.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 19.000.000 | | 19.000.000 | | 19.000.000 | | 19.000.000 | | 19.000.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | 19.000.000 | 4 | 19.000.000 | 4 | 19.000.000 | 4 | 19.000.000 | 4 | 19.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 8 | 8 | 30.000.000 | 8 | 30.000.000 | 8 | 30.000.000 | 8 | 30.000.000 | 8 | 30.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 4 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 70.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 5 | 70.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 15.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | | 15.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 55.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 5 | 55.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 362.167.740 | | 362.167.740 | | 362.167.740 | | 362.167.740 | | 362.167.740 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 362.167.740 | 12 | 362.167.740 | 12 | 362.167.740 | 12 | 362.167.740 | 12 | 362.167.740 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 287.167.740 | | 287.167.740 | | 287.167.740 | | 287.167.740 | | 287.167.740 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 287.167.740 | 12 | 287.167.740 | 12 | 287.167.740 | 12 | 287.167.740 | 12 | 287.167.740 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 | 8 | 85.000.000 | 8 | 85.000.000 | 8 | 85.000.000 | 8 | 85.000.000 | 8 | 85.000.000 | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 | 8 | 25.000.000 | 8 | 25.000.000 | 8 | 25.000.000 | 8 | 25.000.000 | 8 | 25.000.000 | | |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 4 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 8 | 8 | 10.000.000 | 8 | 10.000.000 | 8 | 10.000.000 | 8 | 10.000.000 | 8 | 10.000.000 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 2 | 45.000.000 | 2 | 45.000.000 | 2 | 45.000.000 | 2 | 45.000.000 | 2 | 45.000.000 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 36.000.000 | | 36.400.079,02 | | 36.942.557,07 | | 37.696.350,65 | | 38.580.288,69 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 36.000.000 | 100 | 36.400.079,02 | 100 | 36.942.557,07 | 100 | 37.696.350,65 | 100 | 38.580.288,69 | 7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Besuk | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 4 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 4 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | | |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 21.000.000 | | 21.400.079,02 | | 21.942.557,07 | | 22.696.350,65 | | 23.580.288,69 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 2 | 2 | 21.000.000 | 2 | 21.400.079,02 | 2 | 21.942.557,07 | 2 | 22.696.350,65 | 2 | 23.580.288,69 | | |
| | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | 10.500.000 | | 16.400.079,02 | | 16.942.557,07 | | 17.696.350,65 | | 18.580.288,69 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 2 | 2 | 10.500.000 | 2 | 16.400.079,02 | 2 | 16.942.557,07 | 2 | 17.696.350,65 | 2 | 18.580.288,69 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 10.500.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 2 | 2 | 10.500.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 38.000.000 | | 38.422.305,63 | | 38.994.921,35 | | 39.790.592,35 | | 40.723.638,06 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 38.000.000 | 100 | 38.422.305,63 | 100 | 38.994.921,35 | 100 | 39.790.592,35 | 100 | 40.723.638,06 | 7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Besuk | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 18.000.000 | | 18.422.305,63 | | 18.994.921,35 | | 19.790.592,35 | | 20.723.638,06 | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | 4 | 18.000.000 | 4 | 18.422.305,63 | 4 | 18.994.921,35 | 4 | 19.790.592,35 | 4 | 20.723.638,06 | | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 100 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 10.000.000 | | 10.422.305,63 | | 10.994.921,35 | | 11.790.592,35 | | 12.723.638,06 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.422.305,63 | 4 | 10.994.921,35 | 4 | 11.790.592,35 | 4 | 12.723.638,06 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 50 | 50 | 20.000.000 | 50 | 20.000.000 | 50 | 20.000.000 | 50 | 20.000.000 | 50 | 20.000.000 | | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 50 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 50 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 50 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 64.253.200 | | 64.967.265,47 | | 65.935.486,33 | | 67.280.865,49 | | 68.858.527,91 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 64.253.200 | 100 | 64.967.265,47 | 100 | 65.935.486,33 | 100 | 67.280.865,49 | 100 | 68.858.527,91 | 7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Besuk | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 57.000.000 | | 58.000.000 | | 59.000.000 | | 60.000.000 | | 62.000.000 | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 2 | 2 | 57.000.000 | 2 | 58.000.000 | 2 | 59.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 62.000.000 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 55.000.000 | | 56.000.000 | | 57.000.000 | | 58.000.000 | | 60.000.000 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 4 | 55.000.000 | 4 | 56.000.000 | 4 | 57.000.000 | 4 | 58.000.000 | 4 | 60.000.000 | | |
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 2 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | | |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 7.253.200 | | 6.967.265,47 | | 6.935.486,33 | | 7.280.865,49 | | 6.858.527,91 | | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 2 | 2 | 7.253.200 | 2 | 6.967.265,47 | 2 | 6.935.486,33 | 2 | 7.280.865,49 | 2 | 6.858.527,91 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | 7.253.200 | | 6.967.265,47 | | 6.935.486,33 | | 7.280.865,49 | | 6.858.527,91 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 2 | 2 | 7.253.200 | 2 | 6.967.265,47 | 2 | 6.935.486,33 | 2 | 7.280.865,49 | 2 | 6.858.527,91 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 67.724.000 | | 68.476.638 | | 69.497.159 | | 70.915.213 | | 72.578.096 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 67.724.000 | 100 | 68.476.638 | 100 | 69.497.159 | 100 | 70.915.213 | 100 | 72.578.096 | 7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Besuk | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 67.724.000 | | 68.476.638 | | 69.497.159 | | 70.915.213 | | 72.578.096 | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 4 | 4 | 67.724.000 | 4 | 68.476.638 | 4 | 69.497.159 | 4 | 70.915.213 | 4 | 72.578.096 | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 5 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | | |
| 7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 7.724.000 | | 8.476.638 | | 9.497.159 | | 10.915.213 | | 12.578.096 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 4 | 4 | 7.724.000 | 4 | 8.476.638 | 4 | 9.497.159 | 4 | 10.915.213 | 4 | 12.578.096 | | |
| 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 4 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 3.000.000 | | 3.033.339,91 | | 3.078.546,42 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | 100 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.033.339,91 | 100 | 3.078.546,42 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.215.024,05 | 7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Besuk | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 3.000.000 | | 3.033.339,91 | | 3.078.546,42 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.033.339,91 | 2 | 3.078.546,42 | 2 | 3.141.362,55 | 2 | 3.215.024,05 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | 3.000.000 | | 3.033.339,91 | | 3.078.546,42 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.033.339,91 | 2 | 3.078.546,42 | 2 | 3.141.362,55 | 2 | 3.215.024,05 | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah**.** Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Besuksebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN**
**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 3.000.000 | | 3.033.339,91 | | 3.078.546,42 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |
| Terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | 100 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.033.339,91 | 100 | 3.078.546,42 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.215.024,05 | 7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Besuk | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 3.000.000 | | 3.033.339,91 | | 3.078.546,42 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.033.339,91 | 2 | 3.078.546,42 | 2 | 3.141.362,55 | 2 | 3.215.024,05 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 3.000.000 | | 3.033.339,91 | | 3.078.546,42 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.033.339,91 | 2 | 3.078.546,42 | 2 | 3.141.362,55 | 2 | 3.215.024,05 | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**
**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Besuk | | | | | | | | | |
| 2. | Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | 82,55 | 83,38 | 84,21 | 85,05 | 85,9 | 86,76 | 87,63 | |
| 3. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 72,56 | 72,6 | 72,63 | 72,67 | 72,71 | 72,74 | 72,78 | |

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)** adalah **ukuran keberhasilan yang bersifat operasional** dan digunakan untuk menilai capaian **kinerja kegiatan atau sub kegiatan** dalam rangka mendukung pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** perangkat daerah. **Indikator**

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI**
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA**
**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | 7.01 - KECAMATAN | | | | | | | | | | |
| 2. | Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara berkualitas | positif | % | 82,55 | 83,38 | 84,21 | 85,05 | 85,9 | 86,76 | 87,63 | |

# BAB V

# PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Besuk.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Besuk.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 2025

**CAMAT BESUK**

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN BESUK

**ABDUL BARI, SH, M.Si**
**Pembina**
**NIP. 196908161992021003**

# RENCANA STRATEGIS

# ( RENSTRA )

# KECAMATAN DRINGU

# TAHUN 2025-2029

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dringu Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Dringu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Dringu. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Dringu. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Dringu dengan Kecamatan dan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Dringu,  September 2025

CAMAT DRINGU
KABUPATEN PROBOLINGGO

**INDAH ROHANI, S.Sos, M.M**
Pembina
NIP. 19720308 199202 2 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 6
1.4 Sistematika Penulisan ..... 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Dringu ..... 10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Dringu ..... 17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dringu ..... 21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 27
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Dringu .... 27
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Dringu ..... 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dringu Tahun 2025-2029 ..... 32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Dringu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 40
4.1 Uraian Program ..... 40
4.2 Uraian Kegiatan ..... 44
BAB V PENUTUP ..... 79
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 79
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 80

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..…….…..… 18
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ……..…… 19
Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..….. 19
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ……. 22
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo (2020-2024) …… 23
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Dringu ……..… 30
Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 …….. 35
Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Dringu …… 36
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Dringu ……..... 38
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Dringu ……..…… 33
Tabel 4.1 Program Kecamatan Dringu ……. 42
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dringu ……. 45
Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Dringu …….. 58
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Dringu ……. 61
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… 77
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dringu …….. 78
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Dringu …… 78

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Dringu ……..…. 17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ...… 33
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah …… 34
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dringu …….. 45

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Dringu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dringu setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Dringu juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Dringu. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Dringu berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Dringu terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dringu yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Dringu

untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Dringu berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Dringu dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Dringu disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Dringu akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Dringu dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Dringu untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Dringu berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta Pembangunan wilayah melalui Perencanaan yang sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DRINGU**

Bab II memuat :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dringu
2.2 Sumber Daya Kecamatan Dringu
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dringu
2.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Dringu
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Dringu

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dringu Tahun 2025-2029
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Dringu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dringu 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Dringu; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dringu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Dringu Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan

desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
   b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
   c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;

d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi

kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi

pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Dringu**

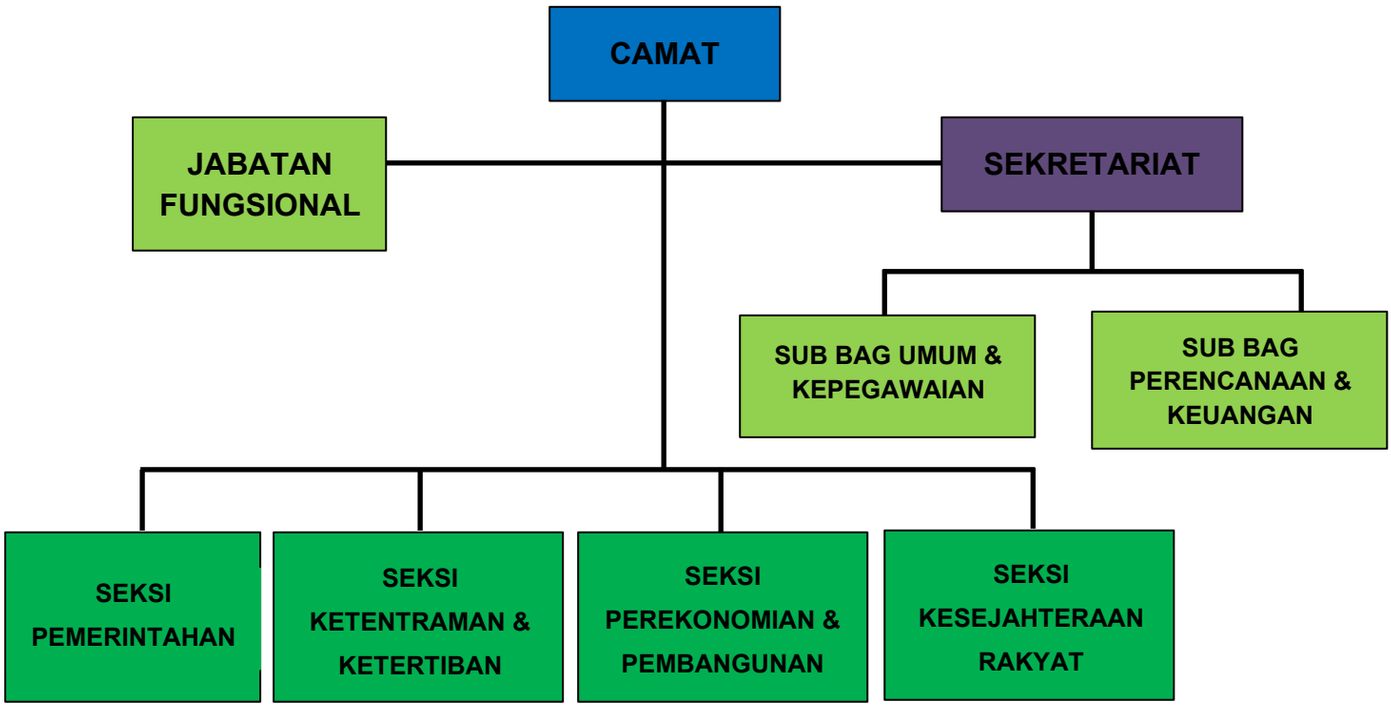


Struktur Organisasi Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Dringu

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional

dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Dringu.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Dringu sebanyak 23 orang dengan rincian : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 15 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 3 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 5 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Dringu berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **1** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **1** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **1** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 9. | Staff | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | **3** |
| 10. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 11. | Honorer | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | **5** |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **6** | **0** | **5** | **4** | **6** | **9** | **15** |

***Sumber Data : Kecamatan Dringu***

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan**

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2. | Perempuan | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| **Jumlah** | | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |

***Sumber Data : Kecamatan Dringu***

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.3**

**Jumlah Sarana Prasarana**

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portable Generating Set | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Pompa Air | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Kendaraan Dinas Roda 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | Gerobak Tarik | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Mesin Absen | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Lemari Besi/Metal | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Lemari Kayu | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Lemari Kaca | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Filing Cabinet Besi | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Peti Uang/Cash Box/Coin Box | 1 | 0 | 1 |
| 12 | CCTV - Camera Control Teletujuanon | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Papan Visual/Papan Nama | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Alat Penghancur Kertas | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Papan nama instansi | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Brand Kas | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Meja Kerja Kayu | 14 | 14 | 0 |
| 18 | Meja Rapat | 4 | 4 | 0 |
| 19 | Tempat Tidur Kayu | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Kasur/Spring Bed | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Meja Makan Besi | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Kursi Fiber Glas/plastik | 35 | 0 | 35 |
| 23 | Kursi Rapat | 73 | 73 | 0 |
| 24 | Kursi Tamu | 6 | 6 | 0 |
| 25 | Bangku Tunggu | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Sofa | 3 | 3 | 0 |
| 27 | Lemari Es | 2 | 0 | 2 |
| 28 | AC Window | 12 | 12 | 0 |
| 29 | AC Split | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Kipas Angin | 5 | 5 | 0 |
| 31 | Rak Piring Alumunium | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Teletujuan | 6 | 4 | 2 |
| 33 | Sound System | 3 | 3 | 0 |
| 34 | Tangga Alumunium | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Mimbar/Podium | 2 | 2 | 0 |
| 36 | Gordyin/Kray | 3 | 3 | 1 |
| 37 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 2 | 2 | 0 |
| 38 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 3 | 3 | 0 |
| 39 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 2 | 2 | 0 |
| 40 | Kursi Kerja | 11 | 11 | 0 |
| 41 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 4 | 4 | 0 |
| 42 | Microphone/wireless MIC | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Proyektor + Attachment | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Layar Film/Projector | 2 | 2 | 0 |
| 45 | LCD Monitor | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Facsimile | 1 | 1 | 0 |
| 47 | P.C Unit | 2 | 1 | 1 |
| 48 | Lap Top | 6 | 4 | 2 |
| 49 | Printer | 8 | 8 | 0 |
| 50 | External/Portable Hard Disk | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Scanner | 1 | 1 | 0 |

***Sumber Data : Kecamatan Dringu***

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dringu

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dringu yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Dringu telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Dringu dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

Target dan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | - | - | 90,7 | 100 | 100 | | | 97,70 | 85,30 | 97,49 | #VALUE! | #VALUE! | 107,72 | 85,30 | 97,49 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | - | - | 96,1 | 100 | 100 | | | 96,10 | 100 | 96,16 | #VALUE! | #VALUE! | 100,00 | 100,00 | 96,16 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | - | - | 92,7 | 100 | 100 | | | 92,70 | 100 | 97,08 | #VALUE! | #VALUE! | 100,00 | 100,00 | 97,08 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | - | - | - | - | 100 | | | - | - | 95,71 | #VALUE! | #VALUE! | - | - | 95,71 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | - | - | 80 | 80 | 74 | | | 70,46 | 70,91 | 70,91 | #VALUE! | #VALUE! | 88,08 | 88,64 | 95,82 |

**Sumber Data : Kecamatan Dringu**

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | 6.647.675.552,00 | - | 7.651.891.824,00 | 2.047.889.034,00 | - | - | - | 3.793.646.749,00 | 1.697.722.713,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 49,58 | 82,90 | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | - | - | 2.337.200,00 | - | - | - | - | 1.795.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 76,80 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | | | 2.337.200,00 | | | | | 1.795.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 76,80 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 6.647.675.552,00 | - | 6.228.445.840,00 | 1.626.396.598,00 | - | - | - | 3.417.583.523,00 | 1.353.713.421,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 54,87 | 83,23 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 4.823.291.776,00 | | 6.099.267.840,00 | 1.584.802.598,00 | - | - | | 3.379.676.775,00 | 1.319.406.255,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 55,41 | 83,25 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | 1.824.383.776,00 | | 129.178.000,00 | 41.594.000,00 | - | - | | 37.906.748,00 | 34.307.166,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 29,34 | 82,48 | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | | | | - | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | | | | - | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | - | | | | - | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | | | | - | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | | | | - | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 201.626.600,00 | 65.898.900,00 | - | - | - | 56.022.000,00 | 50.383.950,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 27,79 | 76,46 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | | 34.959.200,00 | 9.932.000,00 | - | - | | 1.950.000,00 | 5.272.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5,58 | 53,08 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | | 43.539.400,00 | 14.340.400,00 | - | - | | 7.195.000,00 | 10.105.450,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 16,53 | 70,47 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | | 18.785.200,00 | 13.844.000,00 | - | - | | 1.985.000,00 | 8.886.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10,57 | 64,19 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | - | | 78.000.000,00 | 23.940.000,00 | - | - | | 40.070.000,00 | 22.800.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 51,37 | 95,24 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | - | | 6.642.800,00 | 1.826.500,00 | - | - | | 1.702.000,00 | 1.760.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 25,62 | 96,36 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | | 19.700.000,00 | 2.016.000,00 | - | - | | 3.120.000,00 | 1.560.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15,84 | 77,38 | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | | | | - | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah | | | | 150.104.000,00 | 42.231.000,00 | | | | 33.100.000,00 | 41.450.000,00 | | | | | | | |
| Pengadaan Meble | | | | 26.244.000,00 | | | | | 5.500.000,00 | | | | | | | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 123.860.000,00 | 42.231.000,00 | | | | 27.600.000,00 | 41.450.000,00 | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 951.915.384,00 | 269.965.336,00 | - | - | - | 267.142.726,00 | 229.540.542,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28,06 | 85,03 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | | | | - | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | | 176.592.000,00 | 61.409.240,00 | | - | | 53.562.816,00 | 51.285.150,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 30,33 | 83,51 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | | 23.310.200,00 | | | - | | 1.250.000,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5,36 | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | | 752.013.184,00 | 208.556.096,00 | | - | | 212.329.910,00 | 178.255.392,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28,23 | 85,47 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 119.800.000,00 | 41.060.000,00 | - | - | - | 19.798.500,00 | 20.839.800,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 16,53 | 50,75 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | | 89.200.000,00 | 18.000.000,00 | | - | | 12.283.500,00 | 3.494.800,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13,77 | 19,42 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | | | 12.180.000,00 | | - | | | 6.785.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 55,71 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.600.000,00 | 10.880.000,00 | | | | 7.515.000,00 | 10.560.000,00 | | | | | 97,06 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | **-** | **251.152.000,00** | **40.410.000,00** | **-** | **-** | **-** | **157.674.000,00** | **36.508.500,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **62,78** | **90,35** | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | - | 171.152.000,00 | 40.410.000,00 | - | - | - | 114.874.000,00 | 36.508.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 67,12 | 90,35 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | - | | 171.152.000,00 | 40.410.000,00 | - | - | | 114.874.000,00 | 36.508.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 67,12 | 90,35 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | | - | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | - | 80.000.000,00 | - | - | - | - | 42.800.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 53,50 | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | - | - | | 80.000.000,00 | | - | - | | 42.800.000,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 53,50 | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | - | | | | - | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | **-** | **1.049.248.800,00** | **40.235.000,00** | **-** | **-** | **-** | **408.696.000,00** | **33.361.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **38,95** | **82,92** | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | - | 849.248.800,00 | 40.235.000,00 | - | - | - | 381.569.000,00 | 33.361.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44,93 | 82,92 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | | 35.536.800,00 | 13.355.000,00 | - | - | | 17.200.000,00 | 7.842.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 48,40 | 58,72 | | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | - | | 813.712.000,00 | 26.880.000,00 | - | - | | 364.369.000,00 | 25.519.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44,78 | 94,94 | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | - | - | - | 200.000.000,00 | - | - | - | - | 27.127.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13,56 | #DIV/0! | | |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | | 200.000.000,00 | | - | - | | 27.127.000,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13,56 | #DIV/0! | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | | | | - | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | **-** | **150.799.600,00** | **82.058.000,00** | **-** | **-** | **-** | **112.205.800,00** | **69.063.300,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **74,41** | **84,16** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | - | 150.799.600,00 | 82.058.000,00 | - | - | - | 112.205.800,00 | 69.063.300,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 74,41 | 84,16 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | | 150.799.600,00 | 82.058.000,00 | - | - | | 112.205.800,00 | 69.063.300,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 74,41 | 84,16 | | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | | | | - | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | **-** | **233.948.800,00** | **63.740.000,00** | **-** | **-** | **-** | **174.725.400,00** | **62.753.700,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **74,69** | **98,45** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | - | 233.948.800,00 | 63.740.000,00 | - | - | - | 174.725.400,00 | 62.753.700,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 74,69 | 98,45 | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | - | | 233.948.800,00 | 63.740.000,00 | - | - | | 174.725.400,00 | 62.753.700,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 74,69 | 98,45 | | |
| **Jumlah** | **-** | **6.647.675.552,00** | **-** | **9.337.041.024,00** | **2.274.332.034,00** | **-** | **-** | **-** | **4.646.947.949,00** | **1.899.409.213,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **49,77** | **83,52** | | |

**Sumber Data : Kecamatan Dringu**

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah Kecamatan Dringu :

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dringu

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan :

- **Keterbatasan Sumber Daya** : Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur** : Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.
- **Birokrasi yang Kaku** : Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.
- **Akses dan Kesenjangan Digital** : Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.

- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah** : Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital** : Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar-Sektor** : Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur** : Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu** : Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat** : Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Dringu

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;

3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Dringu adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

**Tabel 2.6**

**Isu Strategis Kecamatan Dringu**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi seperti kawasan pesisir | Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br><br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br><br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata berbasis alam | Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensi Sumberdaya Manusia | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

***Sumber Data : Kecamatan Dringu***

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dringu Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Dringu Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dringu, dalam hal ini Kecamatan Dringu diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan

pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Dringu Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

**Gambar 3.1**

**Konsep Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo**

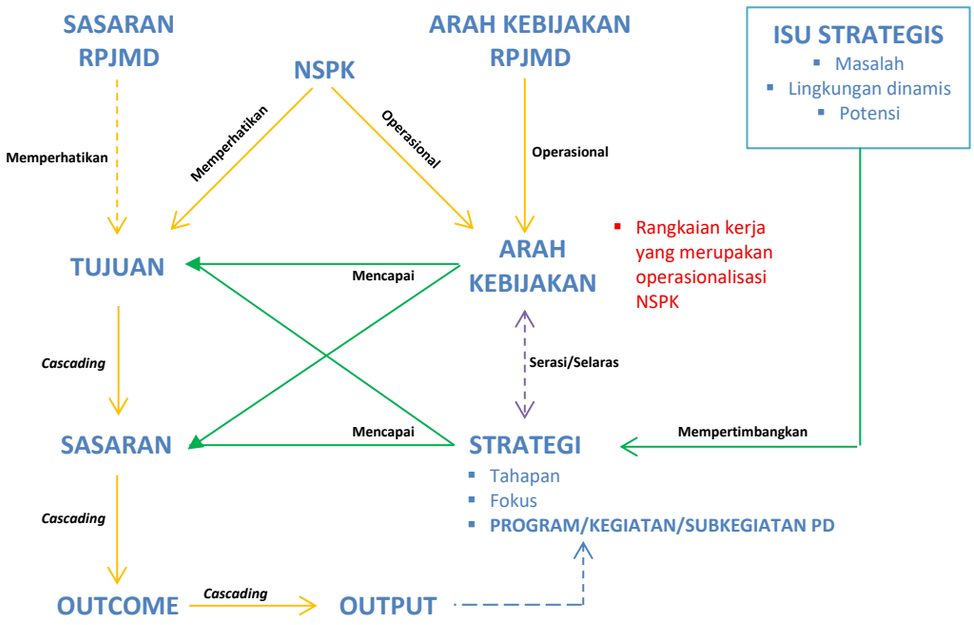


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Dringu Kabupaten

Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.2**

**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**

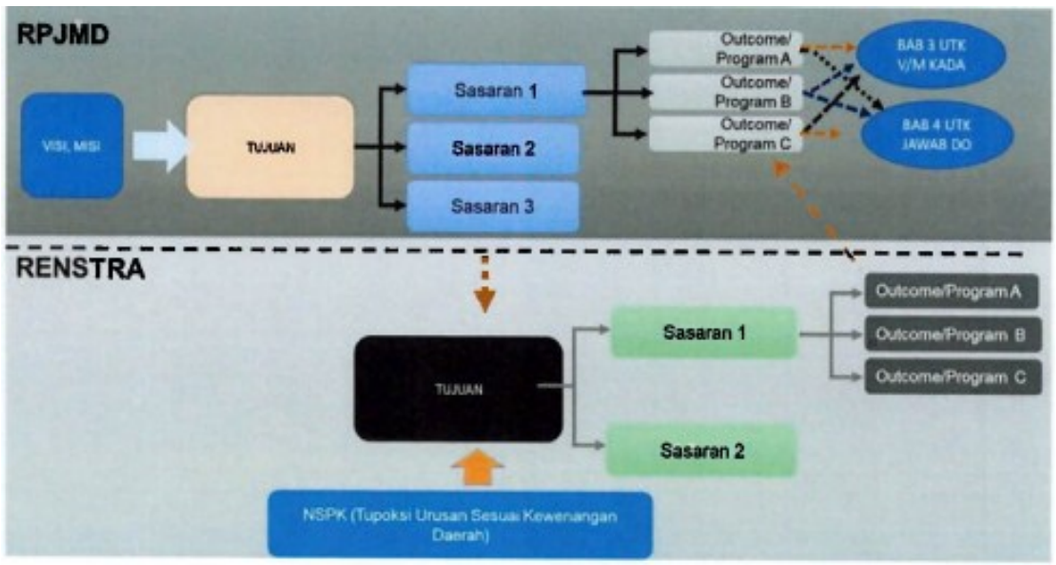


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.1**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dringu**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Dringu** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 82,23 | 83,05 | 83,88 | 84,72 | 85,57 | 86,42 | 87,29 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, diperlukan Misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja

pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dringu

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

**Tabel 3.1.2**

**Definisi Operasional IKU Kecamatan Dringu**

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut : $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| 3. | Persentase | Nilai hasil atas Evaluasi | Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | $\frac{\text{Nilai LHE AKIP tahun (n)}}{\text{Nilai LHE AKIP tahun (n-1)}}$ X 100<br><br>Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Dringu***

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Dringu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Dringu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

## B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Dringu

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Dringu dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Kecamatan Dringu**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan prublik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

***Sumber Data : Kecamatan Dringu***

## C. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Dringu

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Dringu sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Dringu :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Dringu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan

merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Dringu, sebagai berikut

**Tabel 3.3**

**Arah Kebijakan Kecamatan Dringu**

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul; | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

***Sumber Data : Kecamatan Dringu***

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi

pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

## Tabel 4.1

## Program Kecamatan Dringu

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.574.131.820,14 | | 2.605.772.274,53 | | 2.644.669.464,56 | | 2.698.568.466,11 | | 2.761.846.933,19 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.394.521.120,14 | | 2.421.132.166,3 | | 2.457.214.809,37 | | 2.507.352.994,1 | | 2.566.147.668,91 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 70,91 | 70,95 | 70,98 | 2.394.521.120,14 | 71,02 | 2.421.132.166,3 | 71,05 | 2.457.214.809,37 | 71,09 | 2.507.352.994,1 | 71,12 | 2.566.147.668,91 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 32.480.000 | | 32.840.960,18 | | 33.330.395,93 | | 34.010.485,25 | | 34.807.993,79 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 32.480.000 | 100 | 32.840.960,18 | 100 | 33.330.395,93 | 100 | 34.010.485,25 | 100 | 34.807.993,79 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 17.000.000 | | 17.188.926,2 | | 17.445.096,39 | | 17.801.054,47 | | 18.218.469,66 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 17.000.000 | 100 | 17.188.926,2 | 100 | 17.445.096,39 | 100 | 17.801.054,47 | 100 | 18.218.469,66 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 57.730.700 | | 58.372.278,94 | | 59.242.213,32 | | 60.451.019,74 | | 61.868.529,78 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 57.730.700 | 100 | 58.372.278,94 | 100 | 59.242.213,32 | 100 | 60.451.019,74 | 100 | 61.868.529,78 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 72.400.000 | | 73.204.603 | | 74.295.587 | | 75.811.550 | | 77.589.247 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 72.400.000 | 100 | 73.204.603 | 100 | 74.295.587 | 100 | 75.811.550 | 100 | 77.589.247 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 0 | | 3.033.339,91 | | 3.141.362,55 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.033.339,91 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.215.024,05 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2574131820.14 | | 2605772274.53 | | 2644669464.56 | | 2698568466.11 | | 2761846933.19 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 4.1**

**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dringu**

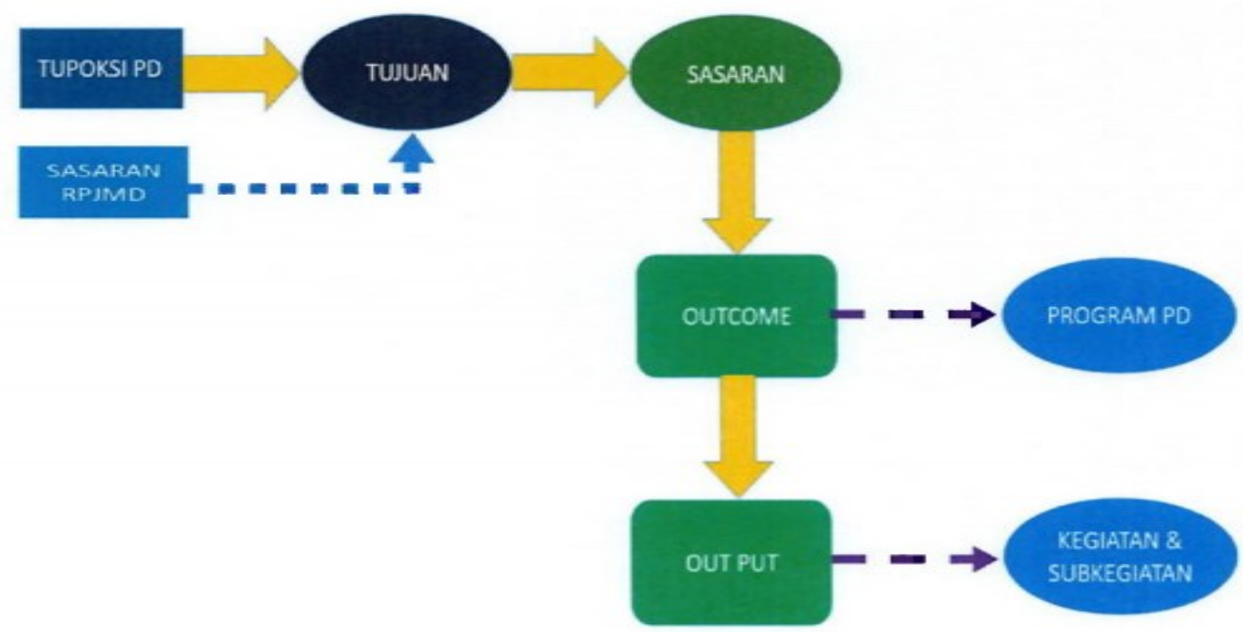

**Tabel 4.2**

**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Dringu**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Dringu** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prosentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Peningkatan fasilitasi pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa/keluarahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2.1**

**Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Dringu**

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Dringu***

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Dringu**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.574.131.820,14 | | 2.605.772.274,53 | | 2.644.669.464,56 | | 2.698.568.466,11 | | 2.761.846.933,19 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.394.521.120,14 | | 2.421.132.166,3 | | 2.457.214.809,37 | | 2.507.352.994,1 | | 2.566.147.668,91 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 70,91 | 70,98 | 2.394.521.120,14 | 71,02 | 2.421.132.166,3 | 71,05 | 2.457.214.809,37 | 71,09 | 2.507.352.994,1 | 71,12 | 2.566.147.668,91 | 7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Dringu | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3.200.000 | | 3.235.520 | | 3.283.729,25 | | 3.350.717,32 | | 3.429.124,11 | | |
| Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | 20 | 3.200.000 | 20 | 3.235.520 | 20 | 3.283.729,25 | 20 | 3.350.717,32 | 20 | 3.429.124,11 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3.200.000 | | 3.235.520 | | 3.283.729,25 | | 3.350.717,32 | | 3.429.124,11 | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 7 | 3.200.000 | 7 | 3.235.520 | 7 | 3.283.729,25 | 7 | 3.350.717,32 | 7 | 3.429.124,11 | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.115.937.196 | | 2.139.455.960,6 | | 2.171.341.628,21 | | 2.215.648.000,05 | | 2.267.616.778,01 | |
| Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 14 | 14 | 2.115.937.196 | 14 | 2.139.455.960,6 | 14 | 2.171.341.628,21 | 14 | 2.215.648.000,05 | 14 | 2.267.616.778,01 | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 0 | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.069.327.196 | | 2.092.328.589,6 | | 2.123.512.059,38 | | 2.166.842.708,02 | | 2.217.669.442,14 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 14 | 14 | 2.069.327.196 | 14 | 2.092.328.589,6 | 14 | 2.123.512.059,38 | 14 | 2.166.842.708,02 | 14 | 2.217.669.442,14 | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 46.610.000 | | 47.127.371 | | 47.829.568,83 | | 48.805.292,03 | | 49.947.335,87 | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 46.610.000 | 12 | 47.127.371 | 12 | 47.829.568,83 | 12 | 48.805.292,03 | 12 | 49.947.335,87 | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
| 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 41.563.300,14 | | 42.024.652,77 | | 42.650.820,09 | | 43.520.896,83 | | 44.539.285,8 | |
| Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 41.563.300,14 | 12 | 42.024.652,77 | 12 | 42.650.820,09 | 12 | 43.520.896,83 | 12 | 44.539.285,8 | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 0 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.332.500 | | 4.380.590,75 | | 4.445.861,55 | | 4.536.557,13 | | 4.642.712,56 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 2 | 4.332.500 | 2 | 4.380.590,75 | 2 | 4.445.861,55 | 2 | 4.536.557,13 | 2 | 4.642.712,56 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.559.000 | | 6.631.804,9 | | 6.730.618,79 | | 6.867.923,42 | | 7.028.632,82 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 2 | 6.559.000 | 2 | 6.631.804,9 | 2 | 6.730.618,79 | 2 | 6.867.923,42 | 2 | 7.028.632,82 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.966.200,14 | | 4.010.224,96 | | 4.069.977,31 | | 4.153.004,85 | | 4.250.185,16 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 0 | 4 | 3.966.200,14 | 4 | 4.010.224,96 | 4 | 4.069.977,31 | 4 | 4.153.004,85 | 4 | 4.250.185,16 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.220.000 | | 23.477.742 | | 23.827.560,36 | | 24.313.642,59 | | 24.882.581,82 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 23.220.000 | 12 | 23.477.742 | 12 | 23.827.560,36 | 12 | 24.313.642,59 | 12 | 24.882.581,82 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1.920.000 | | 1.941.312 | | 1.970.237,55 | | 2.010.430,39 | | 2.057.474,47 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 1.920.000 | 12 | 1.941.312 | 12 | 1.970.237,55 | 12 | 2.010.430,39 | 12 | 2.057.474,47 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 1.565.600 | | 1.582.978,16 | | 1.606.564,53 | | 1.639.338,45 | | 1.677.698,97 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 1.565.600 | 12 | 1.582.978,16 | 12 | 1.606.564,53 | 12 | 1.639.338,45 | 12 | 1.677.698,97 | | |
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 32.016.000 | | 32.371.377,6 | | 32.853.711,13 | | 33.523.926,83 | | 34.308.386,72 | | |
| Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 32.016.000 | 1 | 32.371.377,6 | 1 | 32.853.711,13 | 1 | 33.523.926,83 | 1 | 34.308.386,72 | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 32.016.000 | | 32.371.377,6 | | 32.853.711,13 | | 33.523.926,83 | | 34.308.386,72 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |

| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 32.016.000 | 1 | 32.371.377,6 | 1 | 32.853.711,13 | 1 | 33.523.926,83 | 1 | 34.308.386,72 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 189.804.624 | | 191.911.455,33 | | 194.770.936,01 | | 198.744.263,1 | | 203.394.878,86 | | |
| Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 189.804.624 | 12 | 191.911.455,33 | 12 | 194.770.936,01 | 12 | 198.744.263,1 | 12 | 203.394.878,86 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 32.400.000 | | 32.759.640 | | 33.247.758,64 | | 33.926.012,91 | | 34.719.881,61 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 32.400.000 | 12 | 32.759.640 | 12 | 33.247.758,64 | 12 | 33.926.012,91 | 12 | 34.719.881,61 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 157.404.624 | | 159.151.815,33 | | 161.523.177,37 | | 164.818.250,19 | | 168.674.997,25 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 157.404.624 | 12 | 159.151.815,33 | 12 | 161.523.177,37 | 12 | 164.818.250,19 | 12 | 168.674.997,25 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 12.000.000 | | 12.133.200 | | 12.313.984,68 | | 12.565.189,97 | | 12.859.215,41 | | |
| Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 9 | 10 | 12.000.000 | 10 | 12.133.200 | 10 | 12.313.984,68 | 10 | 12.565.189,97 | 10 | 12.859.215,41 | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 15 | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | | | |
| | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 12.000.000 | | 12.133.200 | | 12.313.984,68 | | 12.565.189,97 | | 12.859.215,41 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 9 | 10 | 12.000.000 | 10 | 12.133.200 | 10 | 12.313.984,68 | 10 | 12.565.189,97 | 10 | 12.859.215,41 | | |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 15 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 32.480.000 | | 32.840.960,18 | | 33.330.395,93 | | 34.010.485,25 | | 34.807.993,79 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 32.480.000 | 100 | 32.840.960,18 | 100 | 33.330.395,93 | 100 | 34.010.485,25 | 100 | 34.807.993,79 | 7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Dringu | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 32.480.000 | | 32.840.960,18 | | 33.330.395,93 | | 34.010.485,25 | | 34.807.993,79 | | |
| Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 0 | 3 | 32.480.000 | 3 | 32.840.960,18 | 3 | 33.330.395,93 | 3 | 34.010.485,25 | 3 | 34.807.993,79 | | |
| | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 32.480.000 | | 32.840.960,18 | | 33.330.395,93 | | 34.010.485,25 | | 34.807.993,79 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 3 | 3 | 32.480.000 | 3 | 32.840.960,18 | 3 | 33.330.395,93 | 3 | 34.010.485,25 | 3 | 34.807.993,79 | |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Prosentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 17.000.000 | | 17.188.926,2 | | 17.445.096,39 | | 17.801.054,47 | | 18.218.469,66 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 17.000.000 | 100 | 17.188.926,2 | 100 | 17.445.096,39 | 100 | 17.801.054,47 | 100 | 18.218.469,66 | 7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Dringu | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 17.000.000 | | 17.188.926,2 | | 17.445.096,39 | | 17.801.054,47 | | 18.218.469,66 | | |
| Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 17.000.000 | 3 | 17.188.926,2 | 3 | 17.445.096,39 | 3 | 17.801.054,47 | 3 | 18.218.469,66 | | |
| | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 4.000.000 | | 4.044.400 | | 4.104.661,56 | | 4.188.396,66 | | 4.286.405,14 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | 8 | 4.000.000 | 8 | 4.044.400 | 8 | 4.104.661,56 | 8 | 4.188.396,66 | 8 | 4.286.405,14 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 13.000.000 | | 13.144.526,2 | | 13.340.434,83 | | 13.612.657,81 | | 13.932.064,52 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 13.000.000 | 3 | 13.144.526,2 | 3 | 13.340.434,83 | 3 | 13.612.657,81 | 3 | 13.932.064,52 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Persentase Peningkatan fasilitasi pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 0 | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 57.730.700 | | 58.372.278,94 | | 59.242.213,32 | | 60.451.019,74 | | 61.868.529,78 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 57.730.700 | 100 | 58.372.278,94 | 100 | 59.242.213,32 | 100 | 60.451.019,74 | 100 | 61.868.529,78 | 7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Dringu | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 57.730.700 | | 58.372.278,94 | | 59.242.213,32 | | 60.451.019,74 | | 61.868.529,78 | | |
| Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | 57.730.700 | 14 | 58.372.278,94 | 14 | 59.242.213,32 | 14 | 60.451.019,74 | 14 | 61.868.529,78 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 57.730.700 | | 58.372.278,94 | | 59.242.213,32 | | 60.451.019,74 | | 61.868.529,78 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | 57.730.700 | 14 | 58.372.278,94 | 14 | 59.242.213,32 | 14 | 60.451.019,74 | 14 | 61.868.529,78 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 72.400.000 | | 73.204.603 | | 74.295.587 | | 75.811.550 | | 77.589.247 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 72.400.000 | 100 | 73.204.603 | 100 | 74.295.587 | 100 | 75.811.550 | 100 | 77.589.247 | 7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Dringu | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 72.400.000 | | 73.204.603 | | 74.295.587 | | 75.811.550 | | 77.589.247 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 200 | 200 | 72.400.000 | 200 | 73.204.603 | 200 | 74.295.587 | 200 | 75.811.550 | 200 | 77.589.247 | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 72.400.000 | | 73.204.603 | | 74.295.587 | | 75.811.550 | | 77.589.247 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 200 | 200 | 72.400.000 | 200 | 73.204.603 | 200 | 74.295.587 | 200 | 75.811.550 | 200 | 77.589.247 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 0 | | 3.033.339,91 | | 3.141.362,55 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.033.339,91 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.215.024,05 | 7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Dringu | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 0 | | 3.033.339,91 | | 3.141.362,55 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa/keluarahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.033.339,91 | 2 | 3.141.362,55 | 2 | 3.141.362,55 | 2 | 3.215.024,05 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 0 | | 3.033.339,91 | | 3.141.362,55 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.033.339,91 | 2 | 3.141.362,55 | 2 | 3.141.362,55 | 2 | 3.215.024,05 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas. Penetapannya berlandaskan pada isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kemampuan pendanaan daerah. Secara eksplisit, Program Prioritas Kecamatan Dringu dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Dringu** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE KERJA |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dringu sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dringu**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Dringu | | | | | | | | | |
| 2. | Indek Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 91,00 | |
| 3. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 82,23 | 83,05 | 83,88 | 84,72 | 85,57 | 86,42 | 87,29 | |
| 4. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Dringu sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Dringu**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | | | | | | | | | | |
| | **NIHIL** | | | | | | | | | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Dringu.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Dringu.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan

kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Dringu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Dringu.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Dringu. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;
2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk

melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;

3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

CAMAT DRINGU
KABUPATEN PROBOLINGGO

**INDAH ROHANI, S.Sos, M.M**
Pembina
NIP. 19720308 199202 2 001

# RENCANA STRATEGIS

# ( RENSTRA )

# KECAMATAN GADING

# TAHUN 2025-2029

**KECAMATAN GADING**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gading Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Gading Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Gading. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Gading. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Gading dengan Kecamatan dan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Gading,  Agustus 2025

**Plt. CAMAT GADING**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN GADING

**BAMBANG HERIWAHJUDI, S.Sos., M.Si.**
Pembina Tingkat 1
NIP. 196712081989031010

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 6
1.4 Sistematika Penulisan ..... 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gading ..... 10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Gading ..... 17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gading ..... 20
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 27
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Gading ..... 27
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Gading ..... 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gading Tahun 2025-2029 ..... 32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Gading dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 40
4.1 Uraian Program ..... 40
4.2 Uraian Kegiatan ..... 44
BAB V PENUTUP ..... 79
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 79
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 80

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..…….…..… 18
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ……..…… 19
Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..….. 19
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ……. 22
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo (2020-2024) …… 23
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Gading ……..… 30
Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 …….. 35
Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Gading …… 36
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Gading ……..... 38
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Gading …… 33
Tabel 4.1 Program Kecamatan Gading ……. 42
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gading ……. 46
Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Gading …….. 54
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Gading ……. 56
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… 67
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gading …….. 68
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Gading …… 68

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Gading ..... 17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo ..... 33
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah ..... 34
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gading ..... 45

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Gading menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gading setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Gading juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Gading. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Gading berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Gading terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gading yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Gading untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Gading berfungsi

mengarahkan pelayanan Kecamatan Gading dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Gading disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Gading akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Gading dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Gading untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Gading berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E);
39. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 ;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan

tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;

2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta Pembangunan wilayah melalui Perencanaan yang sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GADING**

Bab II memuat :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gading
2.2 Sumber Daya Kecamatan Gading
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gading
2.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Gading
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Gading

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gading Tahun 2025-2029
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Gading dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;

3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Gading 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gading; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gading

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Gading Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;

e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. K**EPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;

b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Gading**

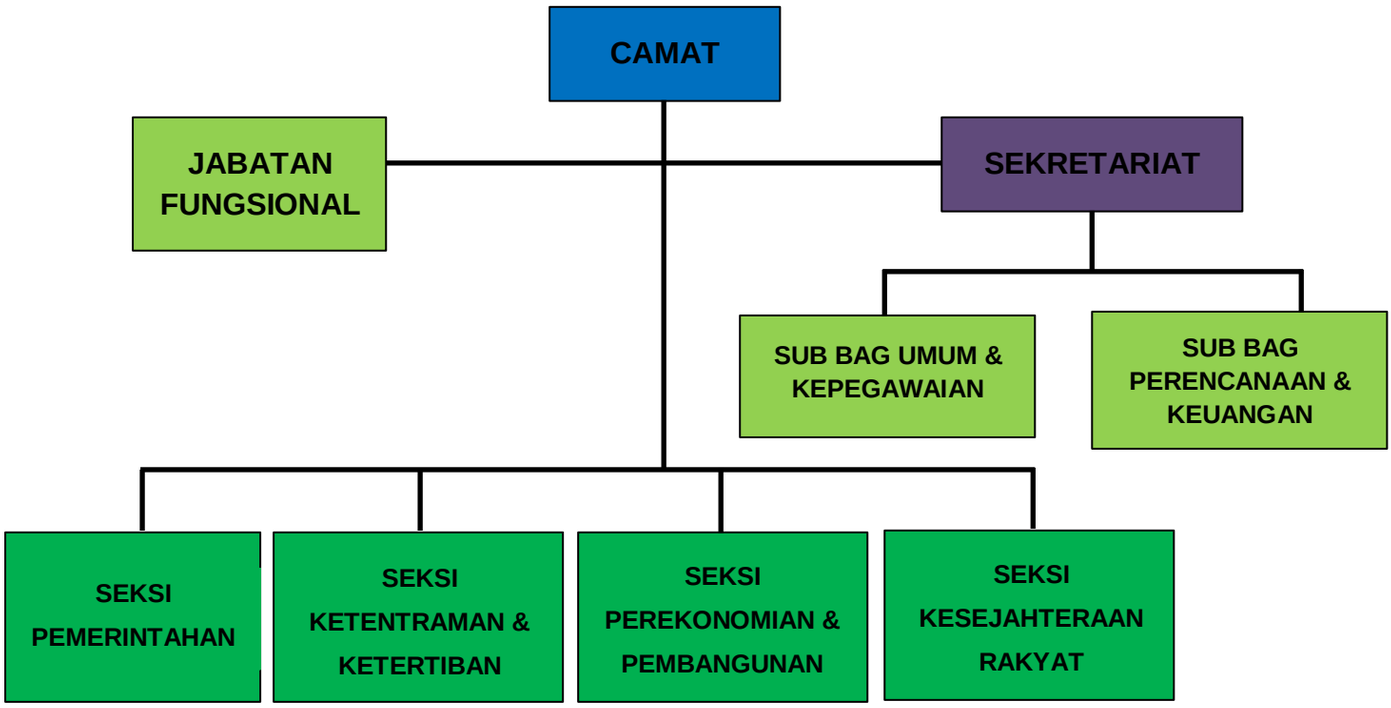


Struktur Organisasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Gading

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional

dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Gading.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Gading sebanyak 23 orang dengan rincian : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 9 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 1 orang perempuan. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 6 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Gading berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 10. | Honorer | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | **6** |
| **Jumlah** | | **0** | **1** | **5** | **0** | **8** | **2** | **11** | **5** | **16** |

***Sumber Data : Kecamatan Gading***

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan**

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 1 | 5 | 2 | - | 3 | **11** | 1 | 4 | 3 | 3 | **11** |
| 2. | Perempuan | - | - | 1 | - | 1 | 3 | **5** | - | 1 | 1 | 3 | **5** |
| **Jumlah** | | **-** | **1** | **6** | **2** | **1** | **6** | **16** | **1** | **5** | **4** | **6** | **16** |

***Sumber Data : Kecamatan Gading***

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.3**

**Jumlah Sarana Prasarana**

| No | Jenis Aset | Jumlah Unit | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genset | 1 | - | 1 |
| 2 | Pompa Air | 1 | 1 | - |
| 3 | Kendaraan Bermotor Roda 4 | 1 | 1 | - |
| 4 | Kendaraan Bermotor Roda 2 | 6 | 6 | - |
| 5 | Scanner | 2 | 2 | - |
| 6 | Lemari Besi | 1 | 1 | - |
| 7 | Lemari Kayu | 7 | 5 | 2 |
| 8 | Rak Kayu | 1 | 1 | - |
| 9 | Filing Cabinet Besi | 4 | 4 | - |
| 10 | Papan Nama | 1 | 1 | - |
| 11 | Alat Penghancur Kertas | 2 | 2 | - |
| 12 | Mesin Absensi | 1 | - | 1 |
| 13 | LCD | 1 | 1 | - |
| 14 | Meja Kerja Kayu | 10 | 2 | 8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Kursi Besi | 10 | 10 | - |
| 16 | Kursi Kayu | 7 | 4 | - |
| 17 | Meja rapat | 7 | 5 | 2 |
| 18 | Tempat Tidur Kayu | 2 | 2 | - |
| 19 | Meja Resepsionis | 1 | 1 | - |
| 20 | Kursi Plastik | 38 | 30 | 8 |
| 21 | Kursi Rapat | 3 | 3 | - |
| 22 | Bangku Tunggu | 4 | 2 | - |
| 23 | AC Window | 7 | 6 | 1 |
| 24 | Televisi | 2 | 2 | - |
| 25 | Meja Tamu Ruang Tunggu | 1 | 1 | - |
| 26 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 | 2 | - |
| 27 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 5 | 5 | - |
| 28 | Laptop | 16 | 8 | 8 |
| 29 | P.C | 3 | 3 | - |
| 30 | Printer | 19 | 6 | - |
| 31 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2 | 2 | - |

***Sumber Data : Kecamatan Gading***

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gading

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gading yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Gading telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Gading dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan

yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

Target dan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 97,70 | 89,83 | 94,96 | | | 97,70 | 89,83 | 94,96 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 96,10 | 73,03 | 99,00 | | | 96,10 | 73,03 | 99,00 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 92,70 | 90,47 | 97,08 | | | 92,70 | 90,47 | 97,08 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | - | - | - | - | 100 | | | - | - | 95,71 | | | - | - | 95,71 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | - | - | 80 | 80 | 74 | | 70 | 67,61 | 70,01 | 70,31 | | | 84,51 | 87,51 | 95,01 |

***Sumber Data : Kecamatan Gading***

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | **2.297.092.250,00** | | | | | **2.136.919.035,00** | | | | | **93,03** | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 3.640.000,00 | - | - | | | 1.971.487.635,00 | | | | | 54.161,75 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 1.230.000 | | | | | 1.170.000,00 | | | | | 95,12 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | 1.410.000,00 | | | | | 1.170.000 | | | | | 82,98 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | 1.000.000 | | | | | 975.000 | | | | | 97,50 | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | 1.979.812.418,00 | | | - | | 1.717.073.083,00 | | | | | 86,73 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 1.943.472.418 | | | | | 1.697.193.083 | | | | | 87,33 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | 34.800.000 | | | | | 18.750.000 | | | | | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | 1.540.000 | | | | | 1.130.000 | | | | | 73,38 | | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | - | 15.231.000,00 | | | - | - | 14.225.000,00 | | | | | 93,40 | | |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | 11.206.000 | | | | | 10.200.000 | | | | | 91,02 | | |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | 4.025.000 | | | | | 4.025.000 | | | | | 100,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | 162.566.582,00 | - | - | | | 121.409.500,00 | | | | | 74,68 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | 5.530.000 | | | | | 5.500.000 | | | | | 99,46 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 27.076.100 | | | | | 27.066.100 | | | | | 99,96 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | 8.497.400 | | | | | 8.497.400 | | | | | 100,00 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | 2.450.000 | | | | | 2.450.000 | | | | | 100,00 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | 6.498.000 | | | | | 3.198.000 | | | | | 49,22 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | 1.240.000 | | | | | - | | | | | - | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 111.275.082 | | | | | 74.698.000 | | | | | | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | 39.870.000,00 | - | - | | | 38.800.000,00 | | | | | 97,32 | | |
| Pengadaan Mebel | | | | | 15.604.000 | | | | | 15.300.000 | | | | | 98,05 | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 24.266.000 | | | | | 23.500.000 | | | | | 96,84 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | 29.690.250,00 | - | - | | | 27.787.852,00 | | | | | 93,59 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | - | | | | | - | | | | | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | - | | | | | - | | | | | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 33.500.000,00 | | | | | 33.147.500,00 | | | | | 98,95 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 195.794.000,00 | | | | | 143.531.400,00 | | | | | 73,31 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | 66.282.000,00 | - | - | | | 52.192.200,00 | | | | | 78,74 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | 23.800.000 | | | | | 17.360.700 | | | | | 72,94 | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 5.576.000 | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | 36.906.000,00 | | | | | 34.831.500 | | | | | 94,38 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | 63.230.000,00 | | - | | | 39.147.000,00 | | | | | 61,91 | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | 15.210.000,00 | | | | | 11.700.000,00 | | | | | 76,92 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | 15.210.000 | | | | | 11.700.000 | | | | | 76,92 | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | 48.020.000,00 | - | - | | | 27.447.000,00 | | | | | 57,16 | | |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | 15.210.000 | | | | | 9.750.000 | | | | | 64,10 | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | 32.810.000,00 | - | - | - | | 17.697.000,00 | | | | | 53,94 | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | 17.600.000,00 | - | - | - | | 15.747.000,00 | | | | | 89,47 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | 8.760.000 | | | | | 7.947.000 | | | | | 90,72 | | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | 8.840.000 | | | | | 7.800.000 | | | | | 88,24 | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | | **15.210.000,00** | | | | | **1.950.000,00** | | | | | **12,82** | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | 7.605.000 | | | | | 1.950.000 | | | | | | | |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 7.605.000 | | | | | - | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | 91.874.000,00 | - | - | | | 83.354.000,00 | | | | | 90,73 | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | 86.154.000,00 | - | - | | | 77.870.000,00 | | | | | 90,38 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | 67.674.000 | | | | | 66.170.000 | | | | | 97,78 | | |
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | 18.480.000 | | | | | 11.700.000 | | | | | **63,31** | | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | 5.720.000,00 | - | - | - | - | 5.484.000,00 | | | | | 95,87 | | |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | 5.720.000 | | | | | 5.484.000 | | | | | 95,87 | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | **42.730.000,00** | | | | | **38.964.000,00** | | | | | **91,19** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | 42.730.000 | | | | | 38.964.000 | | | | | | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | 39.870.000 | | | | | 36.772.000 | | | | | | | |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | 2.860.000 | | | | | 2.192.000 | | | | | | | |

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah Kecamatan Gading :

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gading

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan :

- **Keterbatasan Sumber Daya** : Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur** : Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.
- **Birokrasi yang Kaku** : Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.

- **Akses dan Kesenjangan Digital** : Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah** : Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital** : Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar-Sektor** : Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur** : Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu** : Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat** : Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Gading

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Gading adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

**Tabel 2.6**

**Isu Strategis Kecamatan Gading**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti kawasan pegunungan | Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br><br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br><br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, serta kehutanan | Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

***Sumber Data : Kecamatan Gading***

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gading Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Gading Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gading, dalam hal ini Kecamatan Gading diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan

berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Gading Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

**Gambar 3.1**

**Konsep Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo**

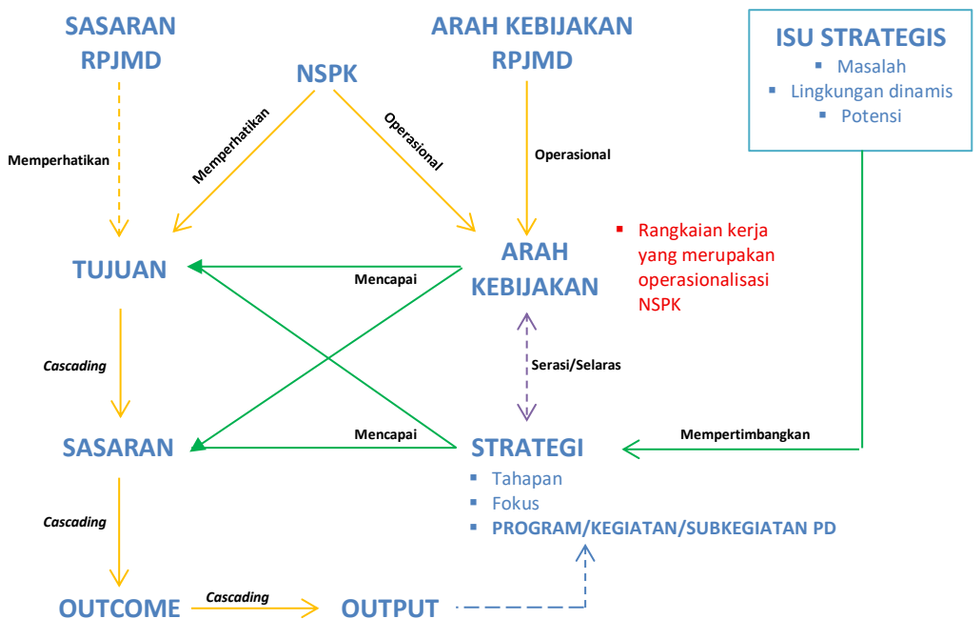


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan

Gading Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.2**

**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**

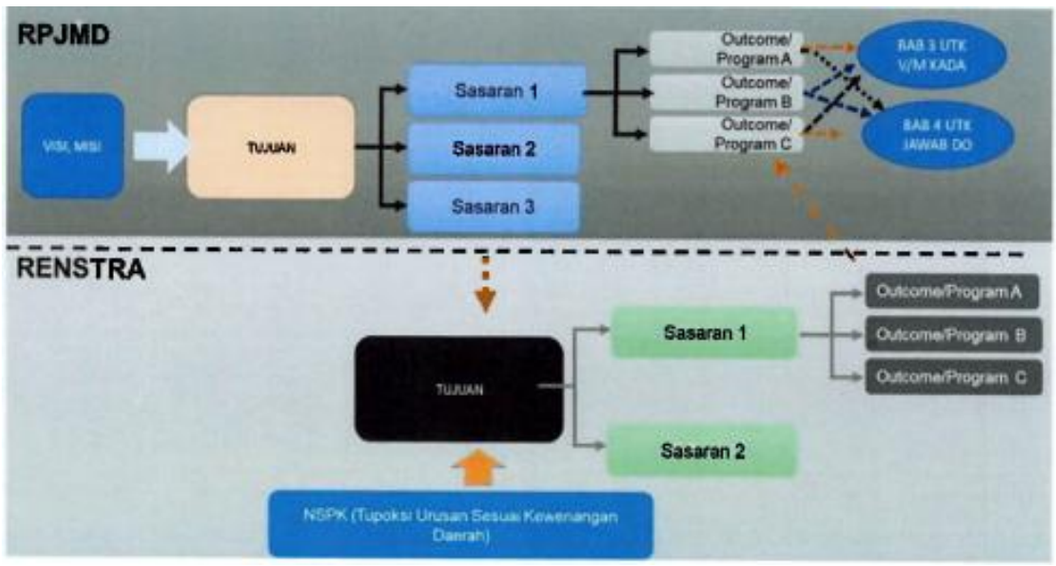


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.1**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gading**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Gading** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 87,5 | 88,38 | 89,26 | 90,15 | 91,05 | 91,96 | 92,88 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, diperlukan Misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja

pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gading

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

**Tabel 3.1.2**

**Definisi Operasional IKU Kecamatan Gading**

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut :<br>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai hasil atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1)<br>——————————— X 100<br>Nilai LHE AKIP tahun (n-1)<br><br>Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Gading***

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Gading dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Gading dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

## B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Gading

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Gading dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Kecamatan Gading**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

***Sumber Data : Kecamatan Gading***

## C. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Gading

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Gading sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Gading :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Gading dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap

tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Gading, sebagai berikut

**Tabel 3.3**

**Arah Kebijakan Kecamatan Gading**

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul; | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

***Sumber Data : Kecamatan Gading***

# BAB IV

# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahun, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi

pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

## Tabel 4.1

## Program Kecamatan Gading

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.818.081.535,21 | | 2.849.399.737,91 | | 2.891.864.942,84 | | 2.950.871.936,51 | | 3.020.066.643,59 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.624.188.435,21 | | 2.653.351.844,54 | | 2.692.895.306,43 | | 2.747.842.428,6 | | 2.812.276.316,61 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 70,31 | 70,35 | 70,38 | 2.624.188.435,21 | 70,42 | 2.653.351.844,54 | 70,45 | 2.692.895.306,43 | 70,49 | 2.747.842.428,6 | 70,52 | 2.812.276.316,61 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 24.000.000 | | 24.266.719,35 | | 24.628.371,38 | | 25.130.900,43 | | 25.720.192,46 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 24.000.000 | 100 | 24.266.719,35 | 100 | 24.628.371,38 | 100 | 25.130.900,43 | 100 | 25.720.192,46 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 20.000.000 | | 20.222.266,12 | | 20.523.642,82 | | 20.942.417,03 | | 21.433.493,71 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.222.266,12 | 100 | 20.523.642,82 | 100 | 20.942.417,03 | 100 | 21.433.493,71 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 25.893.100 | | 26.180.857,95 | | 26.571.036,79 | | 27.113.204,92 | | 27.748.979,8 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 25.893.100 | 100 | 26.180.857,95 | 100 | 26.571.036,79 | 100 | 27.113.204,92 | 100 | 27.748.979,8 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 104.000.000 | | 105.155.783,83 | | 106.722.942,6 | | 108.900.568,5 | | 111.454.167,3 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 104.000.000 | 100 | 105.155.783,83 | 100 | 106.722.942,6 | 100 | 108.900.568,5 | 100 | 111.454.167,3 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 20.000.000 | | 20.222.266,12 | | 20.523.642,82 | | 20.942.417,03 | | 21.433.493,71 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.222.266,12 | 100 | 20.523.642,82 | 100 | 20.942.417,03 | 100 | 21.433.493,71 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2818081535.21 | | 2849399737.91 | | 289186942.84 | | 2950871936.51 | | 3020066643.59 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
15. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gading

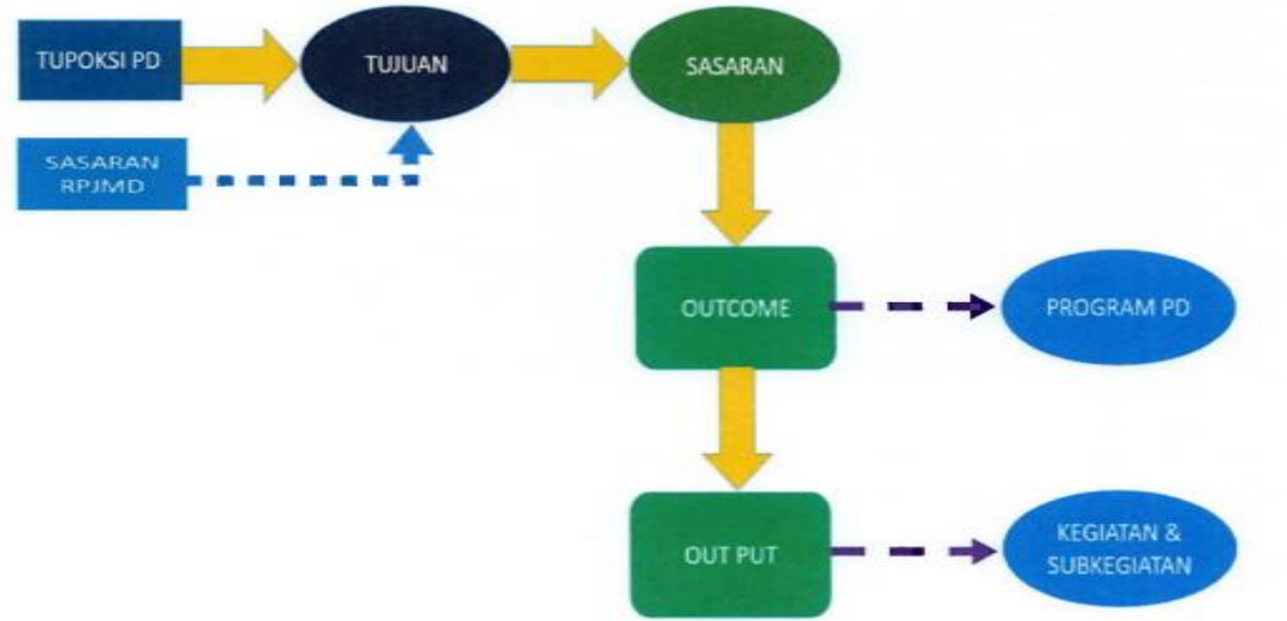

## Tabel 4.2

## Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Gading

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Gading** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang In ovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas tata kelola perangkat daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |
| | | | | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |
| | | | | Prosentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Prosentase Peningkatan Pelayanan Perinjinan Non Usaha Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | Jumlah Kegiatan dan Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Jumlah Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |
| | | | | Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pengawasn Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2.1**

**Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Gading**

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Gading***

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Gading**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.818.081.535,21 | | 2.849.399.737,91 | | 2.891.864.942,84 | | 2.950.871.936,51 | | 3.020.066.643,59 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.624.188.435,21 | | 2.653.351.844,54 | | 2.692.895.306,43 | | 2.747.842.428,6 | | 2.812.276.316,61 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 70,31 | 70,38 | 2.624.188.435,21 | 70,42 | 2.653.351.844,54 | 70,45 | 2.692.895.306,43 | 70,49 | 2.747.842.428,6 | 70,52 | 2.812.276.316,61 | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 8.700.000 | | 8.900.000 | | 9.100.000 | | 9.210.000 | | 9.400.000 | |
| Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 8.700.000 | 2 | 8.900.000 | 2 | 9.100.000 | 2 | 9.210.000 | 2 | 9.400.000 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3.000.000 | | 3.100.000 | | 3.200.000 | | 3.300.000 | | 3.400.000 | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.100.000 | 2 | 3.200.000 | 2 | 3.300.000 | 2 | 3.400.000 | |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 2.850.000 | | 2.900.000 | | 2.950.000 | | 2.955.000 | | 3.000.000 | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 2.850.000 | 2 | 2.900.000 | 2 | 2.950.000 | 2 | 2.955.000 | 2 | 3.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | 2.850.000 | | 2.900.000 | | 2.950.000 | | 2.955.000 | | 3.000.000 | |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 2.850.000 | 2 | 2.900.000 | 2 | 2.950.000 | 2 | 2.955.000 | 2 | 3.000.000 | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.052.150.649,21 | | 2.070.170.058,54 | | 2.115.678.520,43 | | 2.190.325.642,6 | | 2.252.209.530,61 | |
| Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 11 | 11 | 2.052.150.649,21 | 11 | 2.070.170.058,54 | 11 | 2.115.678.520,43 | 11 | 2.190.325.642,6 | 11 | 2.252.209.530,61 | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1.200.000 | 1.300.000 | | 1.350.000 | | 1.400.000 | | 1.500.000 | | 1.550.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1.200.000 | 1.300.000 | | 1.350.000 | | 1.400.000 | | 1.450.000 | | 1.500.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.049.550.649,21 | | 2.067.470.058,54 | | 2.112.828.520,43 | | 2.187.375.642,6 | | 2.249.159.530,61 | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 11 | 11 | 2.049.550.649,21 | 11 | 2.067.470.058,54 | 11 | 2.112.828.520,43 | 11 | 2.187.375.642,6 | 11 | 2.249.159.530,61 | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.300.000 | | 1.350.000 | | 1.400.000 | | 1.450.000 | | 1.500.000 | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1.300.000 | | 1.350.000 | | 1.450.000 | | 1.500.000 | | 1.550.000 | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | |
| 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 39.400.000 | | 39.950.000 | | 40.455.000 | | 41.000.000 | | 41.600.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 1 | 39.400.000 | 1 | 39.950.000 | 1 | 40.455.000 | 1 | 41.000.000 | 1 | 41.600.000 | |
| | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 30.500.000 | | 31.000.000 | | 31.500.000 | | 32.000.000 | | 32.500.000 | |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 1 | 30.500.000 | 1 | 31.000.000 | 1 | 31.500.000 | 1 | 32.000.000 | 1 | 32.500.000 | |
| 7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 8.900.000 | | 8.950.000 | | 8.955.000 | | 9.000.000 | | 9.100.000 | |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 2 | 2 | 8.900.000 | 2 | 8.950.000 | 2 | 8.955.000 | 2 | 9.000.000 | 2 | 9.100.000 | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 52.450.000 | | 52.695.000 | | 52.870.000 | | 31.070.000 | | 31.330.000 | |
| Prosentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 52.450.000 | 1 | 52.695.000 | 1 | 52.870.000 | 1 | 31.070.000 | 1 | 31.330.000 | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.750.000 | | 7.755.000 | | 7.760.000 | | 7.765.000 | | 7.770.000 | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 7.750.000 | 1 | 7.755.000 | 1 | 7.760.000 | 1 | 7.765.000 | 1 | 7.770.000 | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.400.000 | | 4.445.000 | | 4.450.000 | | 4.455.000 | | 4.460.000 | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 4.400.000 | 1 | 4.445.000 | 1 | 4.450.000 | 1 | 4.455.000 | 1 | 4.460.000 | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 24.550.000 | | 24.600.000 | | 24.650.000 | | 2.700.000 | | 2.750.000 | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 24.550.000 | 1 | 24.600.000 | 1 | 24.650.000 | 1 | 2.700.000 | 1 | 2.750.000 | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 2.750.000 | | 2.755.000 | | 2.800.000 | | 2.850.000 | | 2.900.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 2.750.000 | 1 | 2.755.000 | 1 | 2.800.000 | 1 | 2.850.000 | 1 | 2.900.000 | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.700.000 | | 7.740.000 | | 7.760.000 | | 7.800.000 | | 7.850.000 | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 7.700.000 | 1 | 7.740.000 | 1 | 7.760.000 | 1 | 7.800.000 | 1 | 7.850.000 | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 5.300.000 | | 5.400.000 | | 5.450.000 | | 5.500.000 | | 5.600.000 | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 1 | 5.300.000 | 1 | 5.400.000 | 1 | 5.450.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.600.000 | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 80.200.000 | | 80.300.000 | | 80.375.000 | | 80.450.000 | | 80.550.000 | |
| Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 5 | 80.200.000 | 5 | 80.300.000 | 5 | 80.375.000 | 5 | 80.450.000 | 5 | 80.550.000 | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 15 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 27.500.000 | | 27.550.000 | | 27.600.000 | | 27.650.000 | | 27.700.000 | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 15 | 15 | 27.500.000 | 15 | 27.550.000 | 15 | 27.600.000 | 15 | 27.650.000 | 15 | 27.700.000 | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 52.700.000 | | 52.750.000 | | 52.775.000 | | 52.800.000 | | 52.850.000 | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 5 | 52.700.000 | 5 | 52.750.000 | 5 | 52.775.000 | 5 | 52.800.000 | 5 | 52.850.000 | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 269.651.786 | | 279.536.786 | | 272.416.786 | | 273.536.786 | | 274.686.786 | |
| Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 269.651.786 | 12 | 279.536.786 | 12 | 272.416.786 | 12 | 273.536.786 | 12 | 274.686.786 | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.765.000 | | 37.700.000 | | 3.780.000 | | 3.800.000 | | 3.850.000 | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 2 | 2 | 3.765.000 | 2 | 37.700.000 | 2 | 3.780.000 | 2 | 3.800.000 | 2 | 3.850.000 | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 22.100.000 | | 22.200.000 | | 22.300.000 | | 22.350.000 | | 22.400.000 | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 22.100.000 | 12 | 22.200.000 | 12 | 22.300.000 | 12 | 22.350.000 | 12 | 22.400.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 28.000.000 | | 2.850.000 | | 28.550.000 | | 28.600.000 | | 28.650.000 | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | 4 | 28.000.000 | 4 | 2.850.000 | 4 | 28.550.000 | 4 | 28.600.000 | 4 | 28.650.000 | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 215.786.786 | | 216.786.786 | | 217.786.786 | | 218.786.786 | | 219.786.786 | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 6 | 6 | 215.786.786 | 6 | 216.786.786 | 6 | 217.786.786 | 6 | 218.786.786 | 6 | 219.786.786 | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 121.636.000 | | 121.800.000 | | 122.000.000 | | 122.250.000 | | 122.500.000 | |
| Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | 3 | 121.636.000 | 3 | 121.800.000 | 3 | 122.000.000 | 3 | 122.250.000 | 3 | 122.500.000 | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 11 | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 47.500.000 | | 47.550.000 | | 47.600.000 | | 47.650.000 | | 47.750.000 | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 11 | 11 | 47.500.000 | 11 | 47.550.000 | 11 | 47.600.000 | 11 | 47.650.000 | 11 | 47.750.000 | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 6.500.000 | | 6.550.000 | | 6.650.000 | | 6.750.000 | | 6.850.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 8 | 8 | 6.500.000 | 8 | 6.550.000 | 8 | 6.650.000 | 8 | 6.750.000 | 8 | 6.850.000 | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 67.636.000 | | 67.700.000 | | 67.750.000 | | 67.850.000 | | 67.900.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | 3 | 67.636.000 | 3 | 67.700.000 | 3 | 67.750.000 | 3 | 67.850.000 | 3 | 67.900.000 | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 24.000.000 | | 24.266.719,35 | | 24.628.371,38 | | 25.130.900,43 | | 25.720.192,46 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 24.000.000 | 100 | 24.266.719,35 | 100 | 24.628.371,38 | 100 | 25.130.900,43 | 100 | 25.720.192,46 | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 19.500.000 | | 19.716.719,35 | | 19.978.371,38 | | 20.380.900,43 | | 20.920.192,46 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 2 | 2 | 19.500.000 | 2 | 19.716.719,35 | 2 | 19.978.371,38 | 2 | 20.380.900,43 | 2 | 20.920.192,46 | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 19.500.000 | | 19.716.719,35 | | 19.978.371,38 | | 20.380.900,43 | | 20.920.192,46 | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 2 | 2 | 19.500.000 | 2 | 19.716.719,35 | 2 | 19.978.371,38 | 2 | 20.380.900,43 | 2 | 20.920.192,46 | |
| 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | 4.500.000 | | 4.550.000 | | 4.650.000 | | 4.750.000 | | 4.800.000 | |
| Prosentase Peningkatan Pelayanan Perinjinan Non Usaha Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.550.000 | 1 | 4.650.000 | 1 | 4.750.000 | 1 | 4.800.000 | |
| 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 4.500.000 | | 4.550.000 | | 4.650.000 | | 4.750.000 | | 4.800.000 | |
| Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.550.000 | 1 | 4.650.000 | 1 | 4.750.000 | 1 | 4.800.000 | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 20.000.000 | | 20.222.266,12 | | 20.523.642,82 | | 20.942.417,03 | | 21.433.493,71 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.222.266,12 | 100 | 20.523.642,82 | 100 | 20.942.417,03 | 100 | 21.433.493,71 | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 10.000.000 | | 10.100.000 | | 10.201.000 | | 10.303.010 | | 10.406.040 | |
| Jumlah Kegiatan dan Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.100.000 | 2 | 10.201.000 | 2 | 10.303.010 | 2 | 10.406.040 | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 5.000.000 | | 5.050.000 | | 5.100.500 | | 5.151.505 | | 5.203.020 | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 6 | 6 | 5.000.000 | 6 | 5.050.000 | 6 | 5.100.500 | 6 | 5.151.505 | 6 | 5.203.020 | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 5.000.000 | | 5.050.000 | | 5.100.500 | | 5.151.505 | | 5.203.020 | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.050.000 | 2 | 5.100.500 | 2 | 5.151.505 | 2 | 5.203.020 | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 10.000.000 | | 10.122.266,12 | | 10.322.642,82 | | 10.639.407,03 | | 11.027.453,71 | |
| Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 20 | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.122.266,12 | 20 | 10.322.642,82 | 20 | 10.639.407,03 | 20 | 11.027.453,71 | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 5.000.000 | | 5.050.000 | | 5.100.500 | | 5.151.505 | | 5.203.020 | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 20 | 20 | 5.000.000 | 20 | 5.050.000 | 20 | 5.100.500 | 20 | 5.151.505 | 20 | 5.203.020 | |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 5.000.000 | | 5.072.266,12 | | 5.222.142,82 | | 5.487.902,03 | | 5.824.433,71 | |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 20 | 20 | 5.000.000 | 20 | 5.072.266,12 | 20 | 5.222.142,82 | 20 | 5.487.902,03 | 20 | 5.824.433,71 | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 25.893.100 | | 26.180.857,95 | | 26.571.036,79 | | 27.113.204,92 | | 27.748.979,8 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 25.893.100 | 100 | 26.180.857,95 | 100 | 26.571.036,79 | 100 | 27.113.204,92 | 100 | 27.748.979,8 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 21.393.100 | | 21.580.857,95 | | 21.871.036,79 | | 22.313.204,92 | | 22.848.979,8 | |
| Jumlah Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1 | 21.393.100 | 1 | 21.580.857,95 | 1 | 21.871.036,79 | 1 | 22.313.204,92 | 1 | 22.848.979,8 | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 6.500.000 | 6.700.000 | | 6.800.000 | | 6.850.000 | | 6.900.000 | | 6.950.000 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 14.693.100 | | 14.780.857,95 | | 15.021.036,79 | | 15.413.204,92 | | 15.898.979,8 | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1 | 14.693.100 | 1 | 14.780.857,95 | 1 | 15.021.036,79 | 1 | 15.413.204,92 | 1 | 15.898.979,8 | |
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 6.700.000 | | 6.800.000 | | 6.850.000 | | 6.900.000 | | 6.950.000 | |
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 6.500.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.850.000 | 6.850.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.950.000 | 6.950.000 | |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 4.500.000 | | 4.600.000 | | 4.700.000 | | 4.800.000 | | 4.900.000 | |
| Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | |
| 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | 4.500.000 | | 4.600.000 | | 4.700.000 | | 4.800.000 | | 4.900.000 | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 104.000.000 | | 105.155.783,83 | | 106.722.942,6 | | 108.900.568,5 | | 111.454.167,3 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 104.000.000 | 100 | 105.155.783,83 | 100 | 106.722.942,6 | 100 | 108.900.568,5 | 100 | 111.454.167,3 | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 104.000.000 | | 105.155.783,83 | | 106.722.942,6 | | 108.900.568,5 | | 111.454.167,3 | |
| Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 104.000.000 | 2 | 105.155.783,83 | 2 | 106.722.942,6 | 2 | 108.900.568,5 | 2 | 111.454.167,3 | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 300 | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 95.500.000 | | 96.555.783,83 | | 98.022.942,6 | | 100.100.568,5 | | 102.554.167,3 | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 300 | 300 | 95.500.000 | 300 | 96.555.783,83 | 300 | 98.022.942,6 | 300 | 100.100.568,5 | 300 | 102.554.167,3 | |
| 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 8.500.000 | | 8.600.000 | | 8.700.000 | | 8.800.000 | | 8.900.000 | |
| Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 8.500.000 | 2 | 8.600.000 | 2 | 8.700.000 | 2 | 8.800.000 | 2 | 8.900.000 | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 20.000.000 | | 20.222.266,12 | | 20.523.642,82 | | 20.942.417,03 | | 21.433.493,71 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.222.266,12 | 100 | 20.523.642,82 | 100 | 20.942.417,03 | 100 | 21.433.493,71 | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 20.000.000 | | 20.222.266,12 | | 20.523.642,82 | | 20.942.417,03 | | 21.433.493,71 | |
| Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pengawasn Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2.000.000 | 2.200.000 | 20.000.000 | 2.300.000 | 20.222.266,12 | 2.400.000 | 20.523.642,82 | 2.500.000 | 20.942.417,03 | 2.600.000 | 21.433.493,71 | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | 6.200.000 | | 6.300.000 | | 6.400.000 | | 6.500.000 | | 6.600.000 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 4 | 4 | 6.200.000 | 4 | 6.300.000 | 4 | 6.400.000 | 4 | 6.500.000 | 4 | 6.600.000 | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 2.200.000 | | 2.300.000 | | 2.400.000 | | 2.500.000 | | 2.600.000 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 2.200.000 | | 2.300.000 | | 2.400.000 | | 2.500.000 | | 2.600.000 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 4 | 4 | 2.200.000 | 4 | 2.300.000 | 4 | 2.400.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.600.000 | |
| 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 9.400.000 | | 9.322.266,12 | | 9.323.642,82 | | 9.442.417,03 | | 9.633.493,71 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 9.400.000 | 2 | 9.322.266,12 | 2 | 9.323.642,82 | 2 | 9.442.417,03 | 2 | 9.633.493,71 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas. Penetapannya berlandaskan pada isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kemampuan pendanaan daerah. Secara eksplisit, Program Prioritas Kecamatan Gading dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Gading** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | SAE KERJA |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gading sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gading**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Gading | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| 2 | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 88,38 | 89,26 | 90,15 | 91,05 | 91,96 | 92,88 | |
| 3 | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Gading sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Gading**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | | | | | | | | | | |
| | **NIHIL** | | | | | | | | | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Gading.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Gading.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan

kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Gading bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Gading.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Gading. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;
2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk

melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;

3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun beSSrikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

**Plt. CAMAT GADING**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN GADING

**BAMBANG HERIWAHJUDI, S.Sos., M.Si.**
Pembina Tingkat 1
NIP. 196712081989031010

# RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN GENDING KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN GENDING

TAHUN 2025

# KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, rnarilah kita bersarna-sarna tetap rnelaksanakan amanah dalam bidang tugas kita maslng-maslng bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai. Rencana Strategis Kecamatan Gending Tahun 2025-2029 disusun untuk rnemberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecarnatan Gending Kabupaten Probolinggo tahun 2025– 2029 ini rnengacu pada visi, misi dan program Bupati Probolinggo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan sernoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 23 September 2025

**Camat Gending**

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN GENDING

**WINDA PERMATA ERIANTI,S.STP.M,Si**

**Pembina**

**NIP. 19841124 200212 2 002**

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... ii
**DAFTAR ISI** ..... iii
**BAB I** ..... 1
**PENDAHULUAN** ..... 1
**1.1 Latar Belakang** ..... 1
**1.2 Landasan Hukum** ..... 2
**1.3 Maksud dan Tujuan** ..... 5
**1.4 Sistematika Penulisan** ..... 5
**BAB II** ..... 7
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN** ..... 7
**DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
**2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Gending** ..... **7**
**2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** ..... **19**
**BAB III** ..... 2**0**
**TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... 2**0**
**3.1 Tujuan Renstra Kecamatan GendingTahun 2025-2029** ..... 2**0**
**3.2 Sasaran Renstra Kecamatan GendingTahun 2025-2029** ..... 2**3**
**3.3 Straregi Kecamatan Gending dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025- 2029** ..... 25
**3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan GendingTahun 2025-2029** ..... 29
**BAB IV** ..... 31
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** ..... 31
**4.1 Uraian Program** ..... 31
**4.2 Uraian Kegiatan** ..... 33
**BAB V** ..... 47
**PENUTUP** ..... 47

# DAFTAR TABEL

*Tabel 2.1.b.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Gending Berdasarkan pangkat dan Golongan tahun 2025*

*Tabel 2.1.b.2 Jumlah Sarana Prsasarana Kecamatan Gending Tahun 2025*

*Tabel 2.1.c Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gending*

*Tabel 2.2 Isu Strategis Kecamatan Gending*

*Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 3.3 Penahapan Rencana Strategis (Renstra)*

*Table 3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) dan Pendanaan*

*Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukum Program Prioritas Pembangunan Daerah*

*Table 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah*

*Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci*

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan GendingKabupaten Probolinggo yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan GendingTahun 2025 - 2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Gending yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gending yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Gending sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Gending juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Probolinggo, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

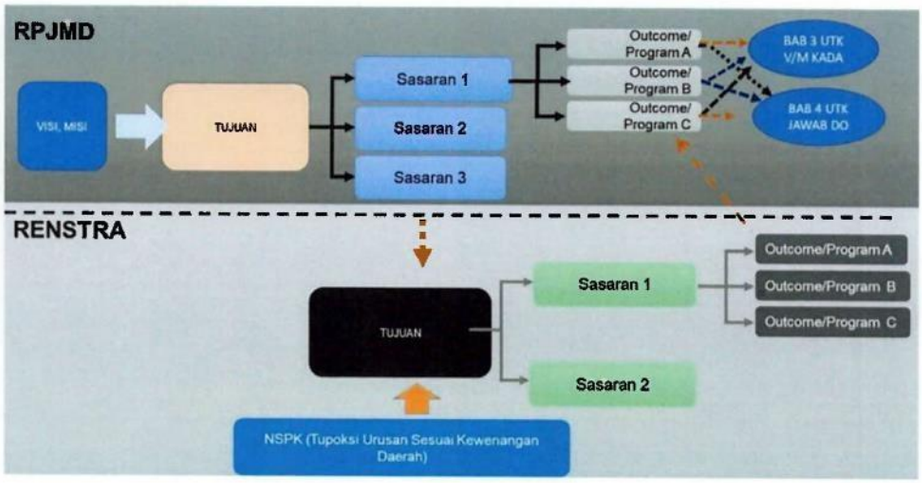


Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Gending yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Probolinggo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gending. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gending dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan ke Tiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentangf Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2024-2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 1 Seri D;
36. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo;
37. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 19 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Gending Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan GendingTahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Gending ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gending sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Gending

### a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Gending

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatnnya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan Gending

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan tentang Kedudukan Kabupaten Probolinggo, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Gending :

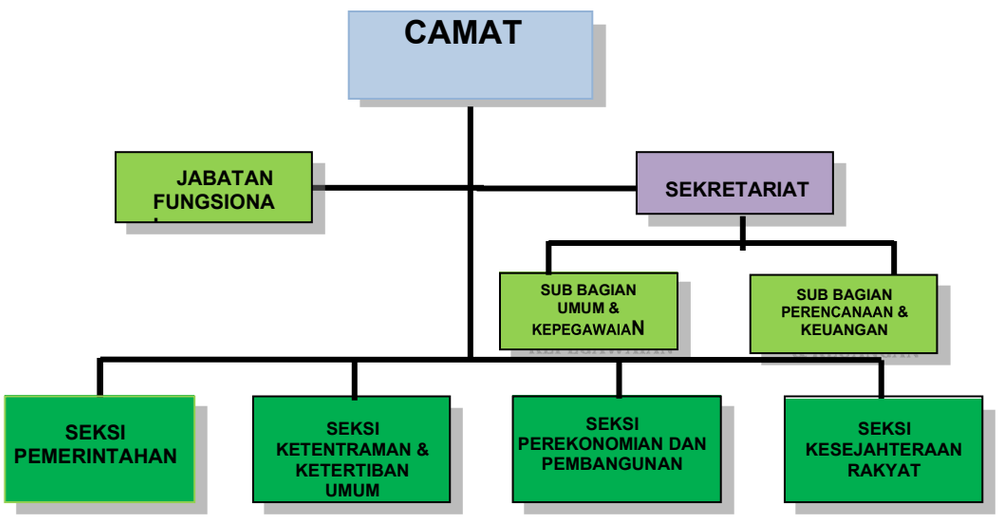

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Gending Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

(1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;

b. pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;

c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

(1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;

b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;

c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;

d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;

e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;

f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);

g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;

h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

3. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai**

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :

a. pelaksanaan urusan administrasi umum;

b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;

c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;

d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;

e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

4. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran,

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d. pengelolaan urusan administrasi keuangan; pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. Kepala Seksi Pemerintahan**

(1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

6. **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

(1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

b. persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

c. persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

d. pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata.

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

7. **Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

(1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi

dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;

e. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

8. **Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat**

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat.
(2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. Kelompok Jabatan Fungsional**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan.
(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Gending

Struktur Organisasi Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat.
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Berikut merupakan data pegawai Kecamatan Gending Tahun 2025 tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.b.1
Data Pegawai Kecamatan Gending

| No | Uraian | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| I | Pegawai PNS | 8 | 2 | 10 |
| II | Pegawai CPNS | - | - | - |
| III | Pegawai PPPK | - | 1 | 1 |
| IV | Non PNS | 4 | - | 4 |
| V | Tingkat Pendidikan CPNS dan PNS : | | | |
| | 1. SLTA | 3 | - | 3 |
| | 2. D-3 | - | - | - |
| | 3. D-4 | - | - | - |
| | 4. S1 | 4 | 2 | 6 |
| | 5. S2 | 1 | 1 | 2 |
| VI | Golongan Kepangkatan CPNS dan PNS: | | | |
| | 1. II a | - | - | - |
| | 2. II b | - | - | - |
| | 3. II c | - | - | - |
| | 1. II d | 3 | - | 3 |
| | 2. III a | - | - | = |
| | 3. III b | - | 1 | 1 |
| | 4. III c | - | 0 | 0 |
| | 5. III d | 3 | - | 3 |
| | 9. IV a | 1 | 1 | 2 |
| | 10. IV b | 1 | - | 1 |
| VII | Golongan PPPK: | - | 1 | 1 |
| | | - | - | - |
| V | Agama: | | | |
| | Islam | 8 | 3 | 11 |
| | Katolik | - | - | - |
| | Budha | - | - | - |
| | Hindu | - | - | - |
| | Lainnya | - | - | - |
| VI | Pejabat struktural | 5 | 1 | 6 |
| VII | Fungsional umum/Staf | 3 | 2 | 5 |

Sumber data: Kecamatan Gending 2025

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Gending terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Jalan Raya Gending No. 92 Gending Kabupaten Probolinggo. Berikut merupakan sarana dan prasarana Kecamatan Gending :

Tabel 2.1.b.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Gending

| NO. | URAIAN SARPRAS | JUMLAH | SATUAN |
|---|---|---|---|
| **Sarana** | | | |
| 1 | Mobil Dinas | 1 | Unit |
| 2 | Sepeda Motor Axelo | 1 | Unit |
| 3 | Sepeda Motor Suzuki 110 | 4 | Unit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Sepeda Motor Suzuki 100 | 1 | Unit |
| 5 | Lemari Besi / Metal | 2 | Buah |
| 6 | Finger Print | 1 | Unit |
| 7 | Genset | 1 | Unit |
| 8 | Lemari Arsip | 5 | Buah |
| 9 | AC | 4 | Unit |
| 10 | Televisi | 1 | Unit |
| 11 | Sound System | 1 | Unit |
| 12 | Papan Pembatas ruangan | 7 | Unit |
| 13 | CCTV | 1 | Unit |
| 14 | Interaktive Dispaly | 1 | Unit |
| 15 | LCD Prjector | 2 | Unit |
| 16 | Lemari Kayu | 3 | Buah |
| 17 | Kursi Tamu | 6 | Buah |
| 18 | Kursi Pelayanan | 4 | Buah |
| 19 | Kursi Tunggu | 2 | Buah |
| 20 | Kursi Rapat | 50 | Buah |
| 21 | Meja Kerja Kayu | 21 | Buah |
| 22 | Kasur / Springbed | 1 | Buah |
| 23 | Lemari Es | 1 | Buah |
| 24 | Sanyo Air | 2 | Unit |
| 25 | Top Speaker | 1 | Unit |
| 26 | Power Fan | 6 | Unit |
| 27 | Alat Pemadam / Portable | 1 | Unit |
| 28 | Meja tulis | 10 | Buah |
| 29 | Rak / Credenza | 1 | Buah |
| 30 | Meja Pelayanan | 1 | Buah |
| 31 | Meja Kerja Pejabat Eselon | 7 | Buah |
| 32 | Meja Kerja Pelaksana | 7 | Buah |
| 33 | Meja Rapat | 7 | Buah |
| 34 | Kursi rapat pejabat | 4 | Buah |
| 35 | Kursi kerja pelaksana | 10 | Buah |
| 36 | Kursi kerja pejabat eselon IV | 8 | Buah |
| 37 | Kamera Digital | 2 | Unit |
| 38 | Audio Mixing Portable | 1 | Unit |
| 39 | Wireless Audio Conference | 1 | Unit |
| 40 | Web Camera Conference | 1 | Unit |
| 41 | Loudspeaker | 2 | Unit |
| 42 | Tablet | 1 | Unit |
| 43 | Kursi dorong | 1 | Buah |
| 44 | PC Unit | 10 | Unit |
| 45 | Laptop | 12 | Unit |
| 46 | Note Book | 7 | Unit |
| 47 | Onboard Computer (OPS) | 1 | Unit |
| 48 | Printer | 5 | Unit |
| 49 | Scanner | 2 | Unit |
| 50 | Barcorde Scanner | 1 | Unit |
| 51 | Meja Podium | 1 | Buah |
| 52 | Pendopo | 1 | Unit |
| 53 | Gedung Kantor | 1 | Unit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54 | Rumah Dinas | 1 | Unit |
| **Prasarana** | | | |
| 1 | Internet | 2 | Unit |
| 2 | Instalasi Listrik | 10.400 w | VA |

**c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Gending**

Kecamatan Gending menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Gending dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **baik** dengan **rasio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Gending berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 80,13 (2021) menjadi 84,28 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2022.
- **Persentase pelayanan publik sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 80% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator **nilai SAKIP** dan **reformasi birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian NA di Tahun 2024 yaitu 72,21, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data perbandingan antara realisasi dan capaian berbasis kinerja dengan realisasi dan capaian berbasis Anggaran di dalam Indikator kinerja (IKU) kecamatan Gending yaitu:

- IKU Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas dengan target 100%, capaian kinerja 84,28% dengan capaian realisasi anggaran 99,71% dengan tingkat efisiensi -15,73% kategori belum efisien.

- IKU Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi target 100%, capaian kinerja 99% dengan capaian realisasi anggaran 99,75% dengan tingkat efisiensi -0,75% kategori belum efisien.
- IKU Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan target 100%, capaian kinerja 95% dengan capaian realisasi anggaran 99,80% dengan tingkat efisiensi -4,8% kategori belum efisien
- IKU Persentase desa/kelurahan yang telah dibina target 100%, capaian kinerja 90% dengan capaian realisasi anggaran 0% dengan tingkat efisiensi 90% kategori efisien**,** kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan tugas - tugas pelimpahan yang dilaksanakan oleh kecamatan
- IKU Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah target 0,5%, realisasi dan capaian nilai AKIP Tahun 2024 oleh APIP di Bulan Maret 2025 yaitu 72,21.

  Secara keseluruhan, Kecamatan Gending menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

**Tabel 2.1.1.c**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gending**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | SPM | Target Indikator Lainnya | Realisasi 2020 | Target Renstra perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | | | | | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 81,96% | 84,73% | 84,28 % | 0,75% | 0,82% | 0,85% | 0,84% | 5,7% | 81% |
| 2 | Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan | | | | | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 86.91% | 93,4% | 95% | 0,92% | 0,87% | 0,93% | 0,95% | 8,9% | 90% |
| 3 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | | | | | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 95% | 99% | 99,75% | 0,92% | 0,95% | 0,99% | 1% | 2,10% | 93% |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | | | | | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0,90% | 0% | 0% |
| 5 | Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah | | | | | 71,24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71,95 | 71,15 | 71,71 | 72,21 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 2,5% | 71 |

Kecamatan Gending menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai mendekati target, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 84,28, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, , umumnya berkinerja "**Baik"**. Kecamatan Gending telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

**d. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Gending**

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana

organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gending dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.2
## Isu Strategis Kecamatan Gending

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Potensi Pertanian dan Perkebunan | Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan Publik | Terdapatnya lahan yang terkontaminasi oleh Limbah B3 kegiatan Industri besar di sekitar sungai besar | Desentralisasi dan Otonomi Daerah | Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan | Keterbatasan Kewenangan Kecamatan | Belum Optimalnya Penyelanggaraan Pelayanan Kecamatan |
| Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa | Terdapat lahan terkotaminasi Limbah B3 yang harus dipulihkan lokasinya di Desa Gending, Pesisir, Pajurangan, Curah Sawo Randu Pitu Kecamatan Gending | Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal | Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan | Disparitas Antar Wilayah | Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa |
| Potensi Wisata | | Adanya lahan terkontaminasi Limbah B3 di Kecamatan Gending. | Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan | Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor | Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten | |
| Potensi Sumber Daya Manusia | | Pembuangan Limbah B3 Industri besar (PT Sasa Inti) di Kecamatan Gending | Digitalisasi dan Pelayanan Publik | Pelayanan Publik yang Belum Optimal | Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu | |
| Potensi Desa Wisata dan Agrowisata | | Terdapat lahan bekas galian C bekas Tol yang belum di fungsikan sehingga menjadi genangan air saat musim penghujan | Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis | Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi | Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan untuk mewujudkan swasembada pangan Nasional | | Adanya banjir yang terjadi di Kecamatan Gending pada Desa Pajurangan, Curah Sawo, Gending, Pesisir dan Randu Pitu | Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan | Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan | Lemahnya Implementasi e-Government | |
| | | Layanan pencegahan proteksi kebakaran belum dilakukan dengan optimal di Kecamatan Gending, | Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat | Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial | Partisipasi Masyarakat dan Transparansi | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adanya bangunan liar di Kecamatan Gending | | Penanganan Konflik Sosial dan Bencana | | |
| | | Masih adanya kasus stunting di Kecamatan Gending | | | | |
| | | Rendahnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di Gending | | | | |
| | | Menurunnya nilai wawasan kebangsaan generasi muda (di seluruh Kabupaten Probolinggo). | | | | |

# BAB III
# TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Gending Tahun 2025 - 2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Gending Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan Gending menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***. Tujuan tersebut selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: "***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gending, dalam hal ini Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Gending Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Gending menetapkan sasaran strategi ”Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Gending tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Gending

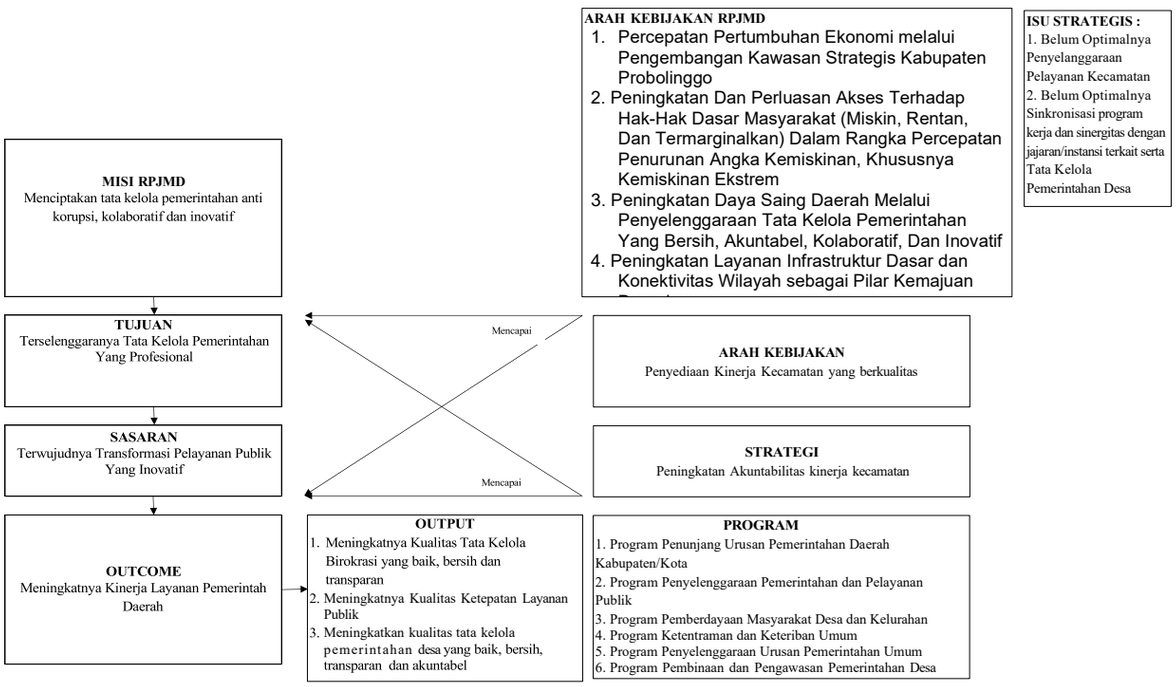


RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi Kepala Daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Gending yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah

3. Menjadi dasar penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Renja (Rencana Kerja) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

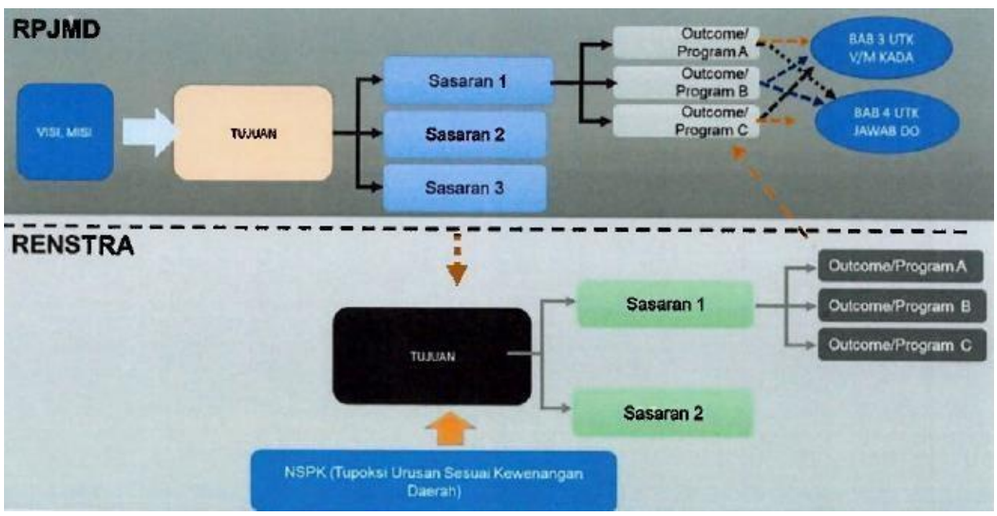


**Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gending** adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. **Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :**

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (**Specific**, **Measurable**, **Achievable, Relevant, Time-bound**) secara Lengkap

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gending dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gending

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Ikdeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (RPJMD) | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,5 | 90,00 | 91,00 | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | 85,12 | 85,97 | 86,83 | 87,70 | 88,58 | 89,46 | Nilai SKM e SUKMA Prop Jatim |

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Serta memperhatikan Devinisi Operasional sudah ditetapkan dengan perhitungan rumus yang telah ditentukan.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam **Strategi Pembangunan**, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam **Arah Kebijakan**, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan,

peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.2.2 Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VISI : **TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO SAE, SEJAHTERA, AMANAH RELIGIUS SERTA EXSIS BERDAYA SAING** | | | | |
| MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif | | | | |
| **TUJUAN / INDIKATOR** | **SASARAN / INDIKATOR** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif<br><br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah<br>Indikator :<br>Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah<br>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan | Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan` | 1 | Penguatan Sistem Perencanaan dan pengukuran Kinerja |
| | | | 2 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan |
| | | | 3 | Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| | | | 4 | Transparansi dan Pelibatan Publik |
| | | | 5 | Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan kecamatan | 1 | Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik |
| | | | 2 | Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi |
| | | | 3 | Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting |
| | | | 4 | Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran |
| | | | 5 | Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat |
| | | Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat di kecamatan | 1 | Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses |
| | | | 2 | Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan |
| | | | 3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan |
| | | | 4 | Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik |
| | | | 5 | Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas |

## 3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan GendingTahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

**Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Gending** sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. **Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Gending:**

1. Meningkatkan **ketepatan sasaran** program/kegiatan.
2. Mempermudah **koordinasi antarperangkat daerah**.
3. Mendukung **pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah**.
4. Menunjang **penggunaan sistem informasi pembangunan daerah**.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik) | Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik) | Permberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat) | Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes serta Koperasi Merah Putih) | Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat) |

## 3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Gending Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Gending sebagai berikut :

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Gending

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN ) | 1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Probolinggo<br>2. Peningkatan Dan Perluasan Akses Terhadap Hak-Hak Dasar Masyarakat (Miskin, Rentan, Dan Termarginalkan) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan, Khususnya Kemiskinan Ekstrem<br>3. Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Kolaboratif, Dan Inovatif<br>4. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah sebagai Pilar Kemajuan Daerah | 1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan<br>2. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja<br>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi<br>4. Transparansi dan Pelibatan Publik<br>5. Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten<br>6. Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik<br>7. Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi<br>8. Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting<br>9. Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran<br>10. Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat<br>11. Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah diakses<br>12. Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan | |
| 2 | Mempercepat Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata (SAE INFRASTRUKTUR) | | | |
| 3 | Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan (SAE EKONOMI) Peningkatan kemandirian Masyarakat Miskin | | | |
| 4 | Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau (SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN) | | | |
| 5 | Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas (SAE SOSIAL) | | | |

**Sumber Data : RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo; Lampiran Perda Nomor 5 Tahun 2025 Bab 3 halaman III/59**

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Gending ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Gending adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam memberdayakan kelompok – kelompok masyarakat desa dan kelurahan untuk wujudkan peningkatan pendidikan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang adil , merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan

pembangunan jangka menengah (RPJMD).

d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat pedesaan dan kelurahan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkuan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan sebagai sarana komunikasi serta menampung aspirasi dan permasalahan dimasyarakat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gendingmerupakan **Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya**, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Gending juga merupakan proses strategis yang harus **terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah**. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gending serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gending dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gending

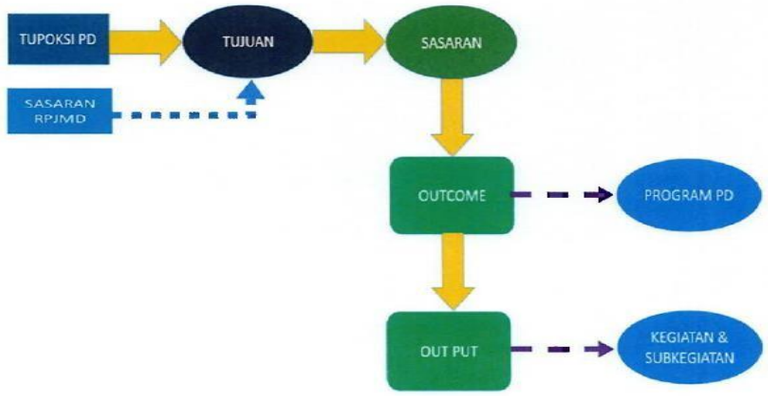


**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.548.412.843,53 | | 2.576.734.135,51 | | 2.615.135.747,54 | | 2.668.496.226,52 | | 2.731.069.533,2 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.372.684.843,53 | | 2.399.053.216,46 | | 2.434.806.812,29 | | 2.484.487.773,55 | | 2.542.746.284,03 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,21 | 72,93 | 73,66 | 2.372.684.843,53 | 74,40 | 2.399.053.216,46 | 75,14 | 2.434.806.812,29 | 75,89 | 2.484.487.773,55 | 76,65 | 2.542.746.284,03 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 36.120.000 | | 36.521.412,61 | | 37.065.698,93 | | 37.822.005,15 | | 38.708.889,64 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 36.120.000 | 100 | 36.521.412,61 | 100 | 37.065.698,93 | 100 | 37.822.005,15 | 100 | 38.708.889,64 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 35.300.000 | | 35.692.299,71 | | 36.224.229,57 | | 36.963.366,06 | | 37.830.116,41 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 35.300.000 | 100 | 35.692.299,71 | 100 | 36.224.229,57 | 100 | 36.963.366,06 | 100 | 37.830.116,41 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 22.508.000 | | 22.758.138,29 | | 23.097.307,63 | | 23.568.596,12 | | 24.121.253,83 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 22.508.000 | 100 | 22.758.138,29 | 100 | 23.097.307,63 | 100 | 23.568.596,12 | 100 | 24.121.253,83 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 37.200.000 | | 37.613.414,99 | | 38.173.975,64 | | 38.952.895,67 | | 39.866.298,31 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 37.200.000 | 100 | 37.613.414,99 | 100 | 38.173.975,64 | 100 | 38.952.895,67 | 100 | 39.866.298,31 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 44.600.000 | | 45.095.653,45 | | 45.767.723,48 | | 46.701.589,97 | | 47.796.690,98 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 44.600.000 | 100 | 45.095.653,45 | 100 | 45.767.723,48 | 100 | 46.701.589,97 | 100 | 47.796.690,98 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 254841284 3.53 | | 257673413 5.51 | | 261513574 7.54 | | 266849622 6.52 | | 273106953 3.20 | |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan

Gendingadalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk menunjang kinerja pelayanan publik kecamatan serta menjalankan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Gending, maka dapat dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Gending dijelaskan pada pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Gending

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gending** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas tata kelola perangkat daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik selama satu tahun | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | terwujudnya peningkatan taraf hidup pekonomian masyarakat di desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | terwujudnya peningkatan taraf hidup pekonomian masyarakat di desa | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan **penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah**, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

# Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.548.412.843,53 | | 2.576.734.135,51 | | 2.615.135.747,54 | | 2.668.496.226,52 | | 2.731.069.533,2 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.372.684.843,53 | | 2.399.053.216,46 | | 2.434.806.812,29 | | 2.484.487.773,55 | | 2.542.746.284,03 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,21 | 73,66 | 2.372.684.843,53 | 74,40 | 2.399.053.216,46 | 75,14 | 2.434.806.812,29 | 75,89 | 2.484.487.773,55 | 76,65 | 2.542.746.284,03 | 7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gending | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3.630.000 | | 3.993.000 | | 4.392.300 | | 4.831.530 | | 5.314.683 | | |
| Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 20 | 3.630.000 | 20 | 3.993.000 | 20 | 4.392.300 | 20 | 4.831.530 | 20 | 5.314.683 | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1.100.000 | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 8 | 1.100.000 | 8 | 1.210.000 | 8 | 1.331.000 | 8 | 1.464.100 | 8 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1.100.000 | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 8 | 1.100.000 | 8 | 1.210.000 | 8 | 1.331.000 | 8 | 1.464.100 | 8 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.430.000 | | 1.573.000 | | 1.730.300 | | 1.903.330 | | 2.093.663 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 20 | 1.430.000 | 20 | 1.573.000 | 20 | 1.730.300 | 20 | 1.903.330 | 20 | 2.093.663 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.118.307.952,53 | | 2.119.242.636,46 | | 2.138.063.174,29 | | 2.147.027.171,55 | | 2.171.642.403,03 | | |
| Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 1 | 2.118.307.952,53 | 1 | 2.119.242.636,46 | 1 | 2.138.063.174,29 | 1 | 2.147.027.171,55 | 1 | 2.171.642.403,03 | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 210 | 210 | | 210 | | 210 | | 210 | | 210 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.115.547.952,53 | | 2.107.594.636,46 | | 2.134.933.574,29 | | 2.143.684.611,55 | | 2.168.065.587,03 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 210 | 210 | 2.115.547.952,53 | 210 | 2.107.594.636,46 | 210 | 2.134.933.574,29 | 210 | 2.143.684.611,55 | 210 | 2.168.065.587,03 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 5 | 1.000.000 | 5 | 1.000.000 | 5 | 1.000.000 | 5 | 1.000.000 | 5 | 1.000.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 880.000 | | 9.680.000 | | 1.064.800 | | 1.171.280 | | 1.288.408 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 48 | 880.000 | 48 | 9.680.000 | 48 | 1.064.800 | 48 | 1.171.280 | 48 | 1.288.408 | | |
| 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 880.000 | | 968.000 | | 1.064.800 | | 1.171.280 | | 1.288.408 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 1 | 880.000 | 1 | 968.000 | 1 | 1.064.800 | 1 | 1.171.280 | 1 | 1.288.408 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 53.149.900 | | 58.460.890 | | 53.258.979 | | 69.897.477 | | 76.487.444 | | |
| Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 53.149.900 | 12 | 58.460.890 | 12 | 53.258.979 | 12 | 69.897.477 | 12 | 76.487.444 | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 4 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.370.100 | | 4.103.110 | | 4.513.421 | | 4.964.763 | | 5.461.239 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | 3.370.100 | 2 | 4.103.110 | 2 | 4.513.421 | 2 | 4.964.763 | 2 | 5.461.239 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.400.000 | | 4.840.000 | | -5.324.000 | | 5.856.200 | | 6.442.040 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 4.400.000 | 2 | 4.840.000 | 2 | -5.324.000 | 2 | 5.856.200 | 2 | 6.442.040 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 2.610.300 | | 2.871.330 | | 3.158.463 | | 3.474.309 | | 3.821.740 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 2.610.300 | 4 | 2.871.330 | 4 | 3.158.463 | 4 | 3.474.309 | 4 | 3.821.740 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 38.769.500 | | 42.646.450 | | 46.911.095 | | 51.602.205 | | 56.762.425 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 38.769.500 | 12 | 42.646.450 | 12 | 46.911.095 | 12 | 51.602.205 | 12 | 56.762.425 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 169.909.991 | | 186.900.990 | | 205.591.089 | | 226.150.198 | | 248.765.217 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 169.909.991 | 12 | 186.900.990 | 12 | 205.591.089 | 12 | 226.150.198 | 12 | 248.765.217 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 197 | | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 21.159.600 | | 23.275.560 | | 25.603.116 | | 28.163.428 | | 30.979.770 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 21.159.600 | 12 | 23.275.560 | 12 | 25.603.116 | 12 | 28.163.428 | 12 | 30.979.770 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 148.750.391 | | 163.625.430 | | 179.987.973 | | 197.986.770 | | 217.785.447 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 148.750.391 | 12 | 163.625.430 | 12 | 179.987.973 | 12 | 197.986.770 | 197 | 217.785.447 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 27.687.000 | | 30.455.700 | | 33.501.270 | | 36.581.397 | | 40.536.537 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | 10 | 27.687.000 | 10 | 30.455.700 | 10 | 33.501.270 | 10 | 36.581.397 | 10 | 40.536.537 | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 27.687.000 | | 30.455.700 | | 33.501.270 | | 36.581.397 | | 40.536.537 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | 10 | 27.687.000 | 10 | 30.455.700 | 10 | 33.501.270 | 10 | 36.581.397 | 10 | 40.536.537 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 36.120.000 | | 36.521.412,61 | | 37.065.698,93 | | 37.822.005,15 | | 38.708.889,64 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 36.120.000 | 100 | 36.521.412,61 | 100 | 37.065.698,93 | 100 | 37.822.005,15 | 100 | 38.708.889,64 | 7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gending | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 29.080.000 | | 28.777.412,61 | | 28.547.298,93 | | 28.451.765,15 | | 28.401.625,64 | | |
| Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik selama satu tahun | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 10 | 9 | 29.080.000 | 9 | 28.777.412,61 | 9 | 28.547.298,93 | 9 | 28.451.765,15 | 9 | 28.401.625,64 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 29.080.000 | | 28.777.412,61 | | 28.547.298,93 | | 28.451.765,15 | | 28.401.625,64 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 10 | 9 | 29.080.000 | 9 | 28.777.412,61 | 9 | 28.547.298,93 | 9 | 28.451.765,15 | 9 | 28.401.625,64 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 7.040.000 | | 7.744.000 | | 8.518.400 | | 9.370.240 | | 10.307.264 | | |
| Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 10 | 6 | 7.040.000 | 6 | 7.744.000 | 6 | 8.518.400 | 6 | 9.370.240 | 6 | 10.307.264 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 7.040.000 | | 7.744.000 | | 8.518.400 | | 9.370.240 | | 10.307.264 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 10 | 6 | 7.040.000 | 6 | 7.744.000 | 6 | 8.518.400 | 6 | 9.370.240 | 6 | 10.307.264 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 35.300.000 | | 35.692.299,71 | | 36.224.229,57 | | 36.963.366,06 | | 37.830.116,41 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 35.300.000 | 100 | 35.692.299,71 | 100 | 36.224.229,57 | 100 | 36.963.366,06 | 100 | 37.830.116,41 | 7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gending | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 35.300.000 | | 35.692.299,71 | | 36.224.229,57 | | 36.963.366,06 | | 37.830.116,41 | | |
| terwujudnya peningkatan taraf hidup pekonomian masyarakat di desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 13 | 3 | 35.300.000 | 3 | 35.692.299,71 | 3 | 36.224.229,57 | 3 | 36.963.366,06 | 3 | 37.830.116,41 | | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 18.458.000 | | 20.303.800 | | 22.334.180 | | 24.567.598 | | 27.024.358 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | 8 | 18.458.000 | 8 | 20.303.800 | 8 | 22.334.180 | 8 | 24.567.598 | 8 | 27.024.358 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 16.842.000 | | 15.388.499,71 | | 13.890.049,57 | | 12.395.768,06 | | 10.805.758,41 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 13 | 3 | 16.842.000 | 3 | 15.388.499,71 | 3 | 13.890.049,57 | 3 | 12.395.768,06 | 3 | 10.805.758,41 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 22.508.000 | | 22.758.138,29 | | 23.097.307,63 | | 23.568.596,12 | | 24.121.253,83 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 22.508.000 | 100 | 22.758.138,29 | 100 | 23.097.307,63 | 100 | 23.568.596,12 | 100 | 24.121.253,83 | 7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gending | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 22.508.000 | | 22.758.138,29 | | 23.097.307,63 | | 23.568.596,12 | | 24.121.253,83 | | |
| terwujudnya peningkatan taraf hidup pekonomian masyarakat di desa | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 14 | 14 | 22.508.000 | 14 | 22.758.138,29 | 14 | 23.097.307,63 | 14 | 23.568.596,12 | 14 | 24.121.253,83 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 22.508.000 | | 22.758.138,29 | | 23.097.307,63 | | 23.568.596,12 | | 24.121.253,83 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 14 | 14 | 22.508.000 | 14 | 22.758.138,29 | 14 | 23.097.307,63 | 14 | 23.568.596,12 | 14 | 24.121.253,83 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 37.200.000 | | 37.613.414,99 | | 38.173.975,64 | | 38.952.895,67 | | 39.866.298,31 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 37.200.000 | 100 | 37.613.414,99 | 100 | 38.173.975,64 | 100 | 38.952.895,67 | 100 | 39.866.298,31 | 7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gending | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 37.200.000 | | 37.613.414,99 | | 38.173.975,64 | | 38.952.895,67 | | 39.866.298,31 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.605 | 1.605 | 37.200.000 | 1.605 | 37.613.414,99 | 1.605 | 38.173.975,64 | 1.605 | 38.952.895,67 | 1.605 | 39.866.298,31 | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 37.200.000 | | 37.613.414,99 | | 38.173.975,64 | | 38.952.895,67 | | 39.866.298,31 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.605 | 1.605 | 37.200.000 | 1.605 | 37.613.414,99 | 1.605 | 38.173.975,64 | 1.605 | 38.952.895,67 | 1.605 | 39.866.298,31 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 44.600.000 | | 45.095.653,45 | | 45.767.723,48 | | 46.701.589,97 | | 47.796.690,98 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 44.600.000 | 100 | 45.095.653,45 | 100 | 45.767.723,48 | 100 | 46.701.589,97 | 100 | 47.796.690,98 | 7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gending | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 44.600.000 | | 45.095.653,45 | | 45.767.723,48 | | 46.701.589,97 | | 47.796.690,98 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 44.600.000 | 2 | 45.095.653,45 | 2 | 45.767.723,48 | 2 | 46.701.589,97 | 2 | 47.796.690,98 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 39.100.000 | | 39.045.653,45 | | 39.112.723,48 | | 39.381.089,97 | | 39.744.140,98 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 39.100.000 | 2 | 39.045.653,45 | 2 | 39.112.723,48 | 2 | 39.381.089,97 | 2 | 39.744.140,98 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 5.500.000 | | 6.050.000 | | 6.655.000 | | 7.320.500 | | 8.052.550 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 5.500.000 | 2 | 6.050.000 | 2 | 6.655.000 | 2 | 7.320.500 | 2 | 8.052.550 | | |

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah yang tertuang dalam Lampiran Perda RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Nomor 5 Tahun 2025 Bab 3 tentang Program Prioritas RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 halaman III/85 di Misi 1 SAE PEMERINTAHAN Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif dengan Program Prioritas 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK. Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4

Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gending** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |

dikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gending sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gending

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gending | | | | | | | | | |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 84,28 | 85,12 | 85,97 | 86,83 | 87,7 | 88,58 | 89,46 | |
| 3. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 72,21 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)** adalah **ukuran keberhasilan yang bersifat operasional** dan digunakan untuk menilai capaian **kinerja kegiatan atau sub kegiatan** dalam rangka mendukung pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** perangkat daerah. **Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Gending** sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.6 dibawah ini

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Gending

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | NIHIL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Gending.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Gending.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 23 September 2025
**Camat Gending**

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN GENDING

**WINDA PERMATA ERIANTI,S.STP.M,Si**
**Pembina**
**NIP. 19841124 200212 2 002**

# RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN KOTAANYAR

TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, rnarilah kita bersarna-sarna tetap rnelaksanakan amanah dalam bidang tugas kita maslng-maslng bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai. Rencana Strategis Kecamatan Kotaanyar Tahun 2025-2029 disusun untuk rnemberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecarnatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo tahun 2025– 2029 ini rnengacu pada visi, misi dan program Bupati Probolinggo yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan sernoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, September 2025
**Camat Kotaanyar**

**HARI PRIBADI,S.STP.M,Si**
**Pembina Tk.I**
**NIP. 19810403 199912 1 001**

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **2**

**BAB I** ..... 4

**PENDAHULUAN** ..... 4

**1.1 Latar Belakang** ..... 4

**1.2 Dasar Hukum Penyusunan** ..... 5

**1.3 Maksud dan Tujuan** ..... 7

**1.4 Sistematika Penulisan** ..... 8

**BAB II** ..... 9

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN** ..... 9

**DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** ..... 9

**2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kotaanyar** ..... 9

**2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** ..... 22

**BAB III** ..... 26

**TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... 26

**3.1 Tujuan Renstra Kecamatan KotaanyarTahun 2025-2029** ..... 26

**3.2 Sasaran Renstra Kecamatan KotaanyarTahun 2025-2029** ..... 26

**3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan KotaanyarTahun 2025- 2029** ..... 31

**3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan KotaanyarTahun 2025-2029** ..... 32

**BAB IV** ..... 34

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** ..... 34

**4.1 Uraian Program** ..... 34

**4.2 Uraian Kegiatan** ..... 35

**BAB V** ..... 49

**PENUTUP** ..... 49

# DAFTAR TABEL

*Tabel 2.1.b.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Kotaanyar Berdasarkan pangkat dan Golongan tahun 2025*

*Tabel 2.1.b.2 Jumlah Sarana Prsasarana Kecamatan Kotaanyar Tahun 2025*

*Tabel 2.1.c Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kotaanyar*

*Tabel 2.2 Isu Strategis Kecamatan Kotaanyar*

*Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis (Renstra)*

*Table 3.5 Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) dan Pendanaan*

*Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukum Program Prioritas Pembangunan Daerah*

*Table 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah*

*Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci*

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan KotaanyarKabupaten Probolinggo yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan KotaanyarTahun 2025 - 2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Kotaanyar yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kotaanyar yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Kotaanyar sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Kotaanyar juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Probolinggo, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 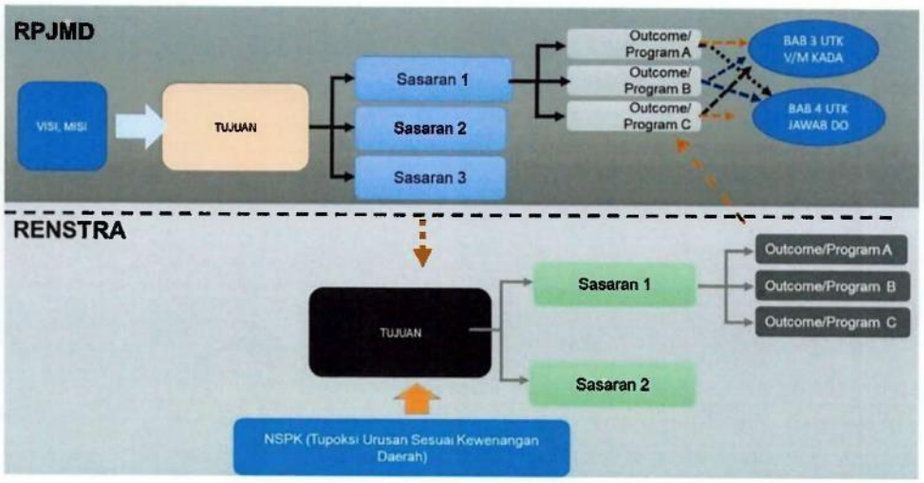

di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Kotaanyar yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Probolinggo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kotaanyar. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kotaanyar dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2024-2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 1 Seri D;
36. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo;
37. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 19 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Kotaanyar Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan KotaanyarTahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kotaanyar ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotaanyar sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kotaanyar Kabupaten

Probolinggo Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kotaanyar

### a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Kotaanyar

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatnnya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan Kotaanyar

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan tentang Kedudukan Kabupaten Probolinggo, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Kotaanyar :

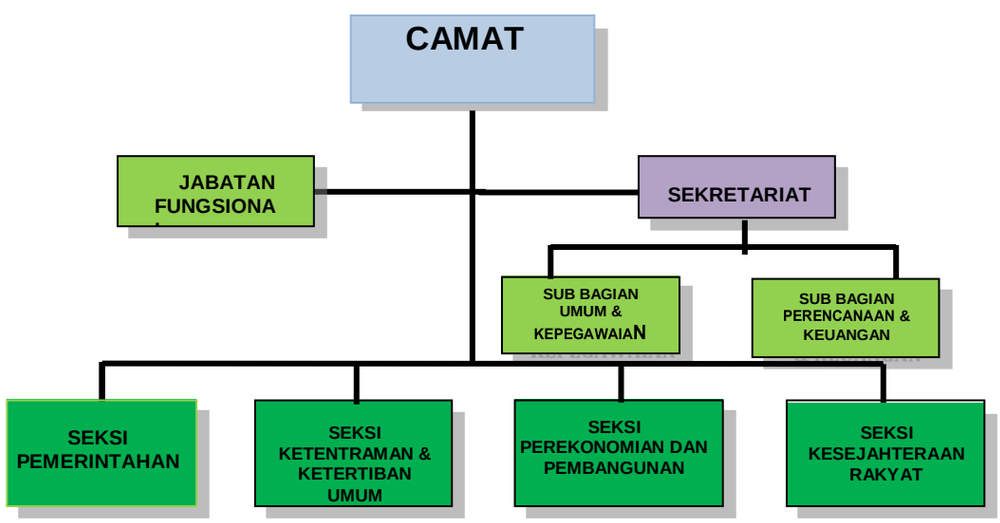

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Kotaanyar Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

(1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;

b. pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;

c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

(1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;

b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;

c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;

d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;

e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;

f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);

g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;

h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai**

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :

a. pelaksanaan urusan administrasi umum;

b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;

c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;

d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;

e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran,

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d. pengelolaan urusan administrasi keuangan; pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. Kepala Seksi Pemerintahan**

(1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

(1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibanumum.

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan KepolisianNegara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

b. persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

c. persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

d. pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata.

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

(1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomimasyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi

dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;

e. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

8. **Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat**

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat.
(2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. Kelompok Jabatan Fungsional**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan.
(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kotaanyar

Struktur Organisasi Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat.
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Berikut merupakan data pegawai Kecamatan KotaanyarTahun 2025 tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.b.1
Data Pegawai Kecamatan Kotaanyar

| No | Uraian | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| I | Pegawai PNS | 9 | 2 | 11 |
| II | Pegawai CPNS | - | - | - |
| III | Pegawai PPPK | - | - | - |
| IV | Non PNS | 5 | 2 | 7 |
| V | Tingkat Pendidikan CPNS dan PNS : | | | |
| | 1. SLTA | 3 | - | 3 |
| | 2. D-3 | 1 | - | 1 |
| | 3. D-4 | - | - | - |
| | 4. S1 | 4 | - | 4 |
| | 5. S2 | 3 | 2 | 5 |
| VI | Golongan Kepangkatan CPNS dan PNS: | | | |
| | 1. II a | - | - | - |
| | 2. II b | - | - | - |
| | 3. II c | - | - | - |
| | 1. II d | 4 | - | 4 |
| | 2. III a | - | - | = |
| | 3. III b | 1 | - | 1 |
| | 4. III c | 2 | - | 2 |
| | 5. III d | 3 | - | 3 |
| | 9. IV a | 1 | 1 | 2 |
| | 10. IV b | 1 | - | 1 |
| VII | Golongan PPPK: | - | - | - |
| | | - | - | - |
| V | Agama: | | | |
| | Islam | 14 | 4 | 18 |
| | Katolik | - | - | - |
| | Budha | - | - | - |
| | Hindu | - | - | - |
| | Lainnya | - | - | - |
| VI | Pejabat struktural | 4 | 1 | 5 |
| VII | Fungsional umum/Staf | 5 | 1 | 6 |

Sumber data: Kecamatan Kotaanyar 2025

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Kotaanyar terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Jalan Raya Kotaanyar No. 92 Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Berikut merupakan sarana dan prasarana Kecamatan Kotaanyar :

Tabel 2.1.b.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kotaanyar

| NO. | URAIAN SARPRAS | JUMLAH | SATUAN |
|---|---|---|---|
| **Sarana** | | | |
| 1 | Mobil Dinas | 1 | Unit |
| 2 | Sepeda Motor Axelo | 1 | Unit |
| 3 | Sepeda Motor Suzuki 110 | 4 | Unit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Sepeda Motor Suzuki 100 | 1 | Unit |
| 5 | Lemari Besi / Metal | 2 | Buah |
| 6 | Finger Print | 1 | Unit |
| 7 | Genset | 1 | Unit |
| 8 | Lemari Arsip | 5 | Buah |
| 9 | AC | 4 | Unit |
| 10 | Televisi | 1 | Unit |
| 11 | Sound System | 1 | Unit |
| 12 | Papan Pembatas ruangan | 7 | Unit |
| 13 | CCTV | 1 | Unit |
| 14 | Interaktive Dispaly | 1 | Unit |
| 15 | LCD Prjector | 2 | Unit |
| 16 | Lemari Kayu | 3 | Buah |
| 17 | Kursi Tamu | 6 | Buah |
| 18 | Kursi Pelayanan | 4 | Buah |
| 19 | Kursi Tunggu | 2 | Buah |
| 20 | Kursi Rapat | 50 | Buah |
| 21 | Meja Kerja Kayu | 21 | Buah |
| 22 | Kasur / Springbed | 1 | Buah |
| 23 | Lemari Es | 1 | Buah |
| 24 | Sanyo Air | 2 | Unit |
| 25 | Top Speaker | 1 | Unit |
| 26 | Power Fan | 6 | Unit |
| 27 | Alat Pemadam / Portable | 1 | Unit |
| 28 | Meja tulis | 10 | Buah |
| 29 | Rak / Credenza | 1 | Buah |
| 30 | Meja Pelayanan | 1 | Buah |
| 31 | Meja Kerja Pejabat Eselon | 7 | Buah |
| 32 | Meja Kerja Pelaksana | 7 | Buah |
| 33 | Meja Rapat | 7 | Buah |
| 34 | Kursi rapat pejabat | 4 | Buah |
| 35 | Kursi kerja pelaksana | 10 | Buah |
| 36 | Kursi kerja pejabat eselon IV | 8 | Buah |
| 37 | Kamera Digital | 2 | Unit |
| 38 | Audio Mixing Portable | 1 | Unit |
| 39 | Wireless Audio Conference | 1 | Unit |
| 40 | Web Camera Conference | 1 | Unit |
| 41 | Loudspeaker | 2 | Unit |
| 42 | Tablet | 1 | Unit |
| 43 | Kursi dorong | 1 | Buah |
| 44 | PC Unit | 10 | Unit |
| 45 | Laptop | 12 | Unit |
| 46 | Note Book | 7 | Unit |
| 47 | Onboard Computer (OPS) | 1 | Unit |
| 48 | Printer | 5 | Unit |
| 49 | Scanner | 2 | Unit |
| 50 | Barcorde Scanner | 1 | Unit |
| 51 | Meja Podium | 1 | Buah |
| 52 | Pendopo | 1 | Unit |
| 53 | Gedung Kantor | 1 | Unit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54 | Rumah Dinas | 1 | Unit |
| **Prasarana** | | | |
| 1 | Internet | 2 | Unit |
| 2 | Instalasi Listrik | 10.400 w | VA |

**c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kotaanyar**

Kecamatan Kotaanyar menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Kotaanyar dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **baik** dengan **rasio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Kotaanyar berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 80,13 (2021) menjadi 84,28 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2022.
- **Persentase pelayanan sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 80% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator **nilai SAKIP** dan **reformasi birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian NA di Tahun 2024 yaitu 72,21, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data perbandingan antara realisasi dan capaian berbasis kinerja dengan realisasi dan capaian berbasis Anggaran di dalam Indikator kinerja (IKU) kecamatan Kotaanyar yaitu:

- IKU Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas dengan target 100%, capaian kinerja 84,28% dengan capaian realisasi anggaran 99,71% dengan tingkat efisiensi -15,73% kategori belum efisien.
- IKU Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi target 100%,

capaian kinerja 99% dengan capaian realisasi anggaran 99,75% dengan tingkat efisiensi -0,75% kategori belum efisien.

- IKU Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan target 100%, capaian kinerja 95% dengan capaian realisasi anggaran 99,80% dengan tingkat efisiensi -4,8% kategori belum efisien
- IKU Persentase desa/kelurahan yang telah dibina target 100%, capaian kinerja 90% dengan capaian realisasi anggaran 0% dengan tingkat efisiensi 90% kategori efisien**,** kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan tugas - tugas pelimpahan yang dilaksanakan oleh kecamatan
- IKU Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah target 0,5%, realisasi dan capaian nilai AKIP Tahun 2024 oleh APIP di Bulan Maret 2025 yaitu 72,21.

  Secara keseluruhan, Kecamatan Kotaanyar menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

**Tabel 2.1.1.c**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kotaanyar**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | SPM | Target Indikator Lainnya | Realisasi 2020 | Target Renstra perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | | | | | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 81,96% | 84,73% | 84,28 % | 0,75% | 0,82% | 0,85% | 0,84% | 5,7% | 81% |
| 2 | Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan | | | | | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 86.91% | 93,4% | 95% | 0,92% | 0,87% | 0,93% | 0,95% | 8,9% | 90% |
| 3 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | | | | | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 95% | 99% | 99,75% | 0,92% | 0,95% | 0,99% | 1% | 2,10% | 93% |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | | | | | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0,90% | 0% | 0% |
| 5 | Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah | | | | | 71,24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71,95 | 71,15 | 71,71 | 72,21 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 2,5% | 71 |

Kecamatan Kotaanyar menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai mendekati target, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 84,28, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, , umumnya berkinerja "**Baik"**. Kecamatan Kotaanyar telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

**d. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Kotaanyar**

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana

organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kotaanyar dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.2
## Isu Strategis Kecamatan Kotaanyar

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Potensi Pertanian dan Perkebunan | Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan Publik | Terdapatnya lahan yang terkontaminasi oleh Limbah B3 kegiatan Industri besar di sekitar sungai besar | Desentralisasi dan Otonomi Daerah | Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan | Keterbatasan Kewenangan Kecamatan | Belum Optimalnya Penyelanggaraan Pelayanan Kecamatan |
| Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa | Terdapat lahan terkotaminasi Limbah B3 yang harus dipulihkan lokasinya di Desa Kotaanyar, Pesisir, Pajurangan, Curah Sawo Randu Pitu Kecamatan Kotaanyar | Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal | Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan | Disparitas Antar Wilayah | Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa |
| Potensi Wisata | | Adanya lahan terkontaminasi Limbah B3 di Kecamatan Kotaanyar. | Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan | Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor | Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten | |
| Potensi Sumber Daya Manusia | | Pembuangan Limbah B3 Industri besar (PT Sasa Inti) di Kecamatan Kotaanyar | Digitalisasi dan Pelayanan Publik | Pelayanan Publik yang Belum Optimal | Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu | |
| Potensi Desa Wisata dan Agrowisata | | Terdapat lahan bekas galian C bekas Tol yang belum di fungsikan sehingga menjadi genangan air saat musim penghujan | Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis | Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi | Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan untuk mewujudkan swasembada pangan Nasional | | Adanya banjir yang terjadi di Kecamatan Kotaanyar pada Desa Pajurangan, Curah Sawo, Kotaanyar, Pesisir dan Randu Pitu | Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan | Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan | Lemahnya Implementasi e-Government | |
| | | Layanan pencegahan proteksi kebakaran belum dilakukan dengan optimal di Kecamatan Kotaanyar, | Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat | Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial | Partisipasi Masyarakat dan Transparansi | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adanya bangunan liar di Kecamatan Kotaanyar | | Penanganan Konflik Sosial dan Bencana | | |
| | | Masih adanya kasus stunting di Kecamatan Kotaanyar | | | | |
| | | Rendahnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di Kotaanyar | | | | |
| | | Menurunnya nilai wawasan kebangsaan generasi muda (di seluruh Kabupaten Probolinggo). | | | | |

# BAB III
# TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kotaanyar Tahun 2025 - 2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Kotaanyar Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan Kotaanyar menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***. Tujuan tersebut selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: "***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotaanyar, dalam hal ini Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Kotaanyar Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kotaanyar menetapkan sasaran strategi ”Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kotaanyar tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Kotaanyar

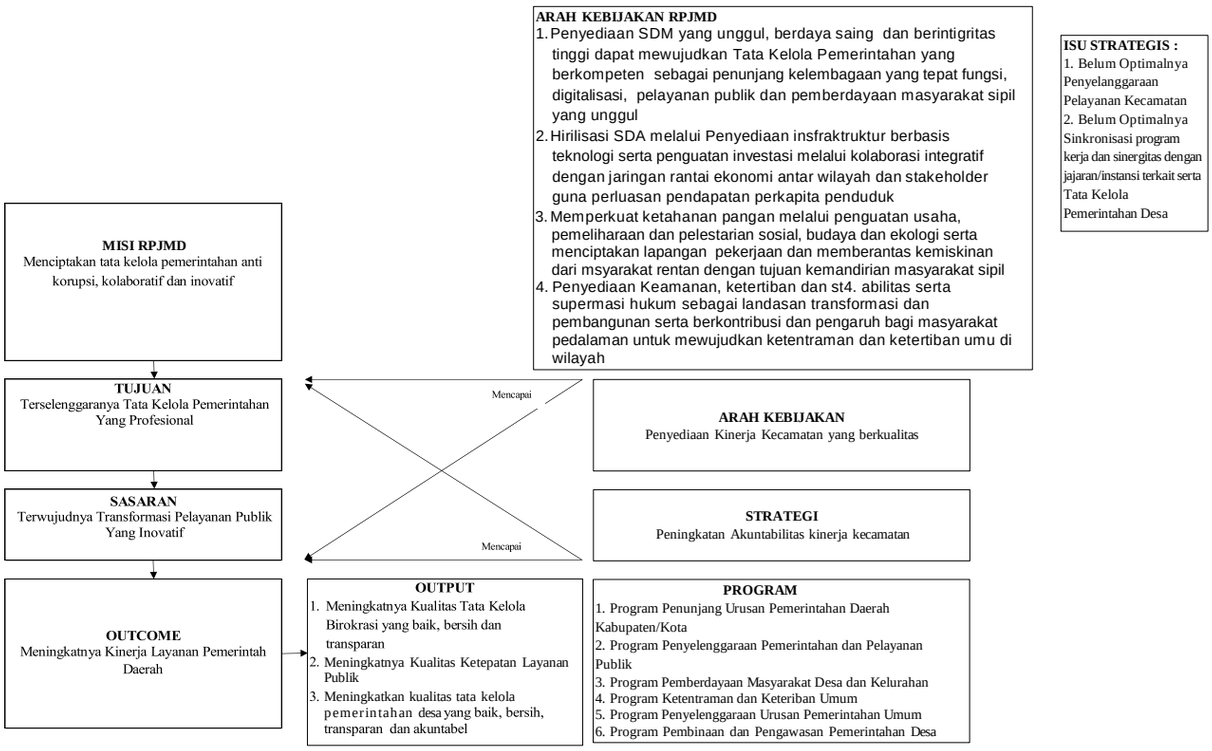


RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Kotaanyar yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah

3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

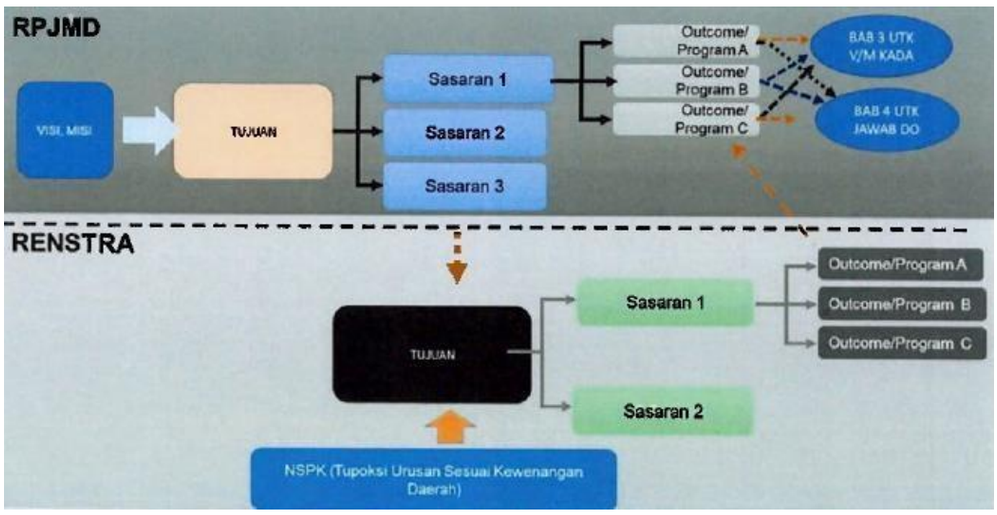


## 3.3 Tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra)

**Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kotaanyar** adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. **Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :**

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (**Specific**, **Measurable**, **Achievable, Relevant, Time-bound**) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kotaanyar dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kotaanyar

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Ikdeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (RPJMD) | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,5 | 90,00 | 91,00 | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | 72,25 | 73,66 | 74,40 | 75,14 | 75,89 | 76,65 | Nilai LHE AKIP |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | 85,12 | 85,97 | 86,83 | 87,70 | 88,58 | 89,46 | Nilai SKM e SUKMA Prop Jatim |

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Serta memperhatikan Devinisi Operasional sudah ditetapkan dengan perhitungan rumus yang telah ditentukan.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisataberbasis budaya

lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.3. Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

| | | | |
|---|---|---|---|
| VISI : **TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO SAE, SEJAHTERA, AMANAH RELIGIUS SERTA EXSIS BERDAYA SAING** | | | |
| MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif | | | |
| **TUJUAN / INDIKATOR** | **SASARAN / INDIKATOR** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif<br><br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah<br>Indikator :<br>Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah<br>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan | Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan` | 1 Penguatan Sistem Perencanaan dan pengukuran Kinerja<br>2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan<br>3 Pemanfaatan Teknologi Informasi<br>4 Transparansi dan Pelibatan Publik<br>5 Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan kecamatan | 1 Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik<br>2 Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi<br>3 Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting<br>4 Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran<br>5 Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat |
| | | Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat di kecamatan | 1 Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses<br>2 Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan<br>3 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan<br>4 Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik<br>5 Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas |

### 3.4 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan KotaanyarTahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

**Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Kotaanyar** sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. **Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Kotaanyar:**

1. Meningkatkan **ketepatan sasaran** program/kegiatan.
2. Mempermudah **koordinasi antarperangkat daerah**.
3. Mendukung **pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah**.
4. Menunjang **penggunaan sistem informasi pembangunan daerah**.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik) | Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik) | Permberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat) | Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes) | Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat) |

## 3.5 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kotaanyar Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Kotaanyar sebagai berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kotaanyar

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN ) | 1. Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul | 1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan<br>2. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja<br>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi<br>4. Transparansi dan Pelibatan Publik<br>5. Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten<br>6. Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik<br>7. Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi<br>8. Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting<br>9. Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran<br>10. Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat<br>11. Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah diakses<br>12. Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan | |
| 2 | Mempercepat Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata (SAE INFRASTRUKTUR) | 2. Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfraktruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita penduduk | | |
| 3 | Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan (SAE EKONOMI) Peningkatan kemandirian Masyarakat Miskin | 3.Memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan usaha, pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta menciptakan lapangan pekerjaan dan memberantas kemiskinan dari masyarakat rentan dengan tujuan kemandirian masyarakat sipil | | |
| 4 | Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau (SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN) | 4. Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi masyarakat pedalaman untuk mewujudkan pedalaman ketentraman dan ketertiban umum di wilayah | | |
| 5 | Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas (SAE SOSIAL) | | | |

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Kotaanyar ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Kotaanyar adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam memberdayakan kelompok – kelompok masyarakat desa dan kelurahan untuk wujudkan peningkatan pendidikan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang adil , merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat pedesaan dan kelurahan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkuan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan sebagai sarana komunikasi serta menampung aspirasi dan permasalahan dimasyarakat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

### 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Kotaanyaradalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kotaanyarmerupakan **Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya**, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kotaanyar juga merupakan proses strategis yang harus **terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah**. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kotaanyar serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kotaanyar dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kotaanyar

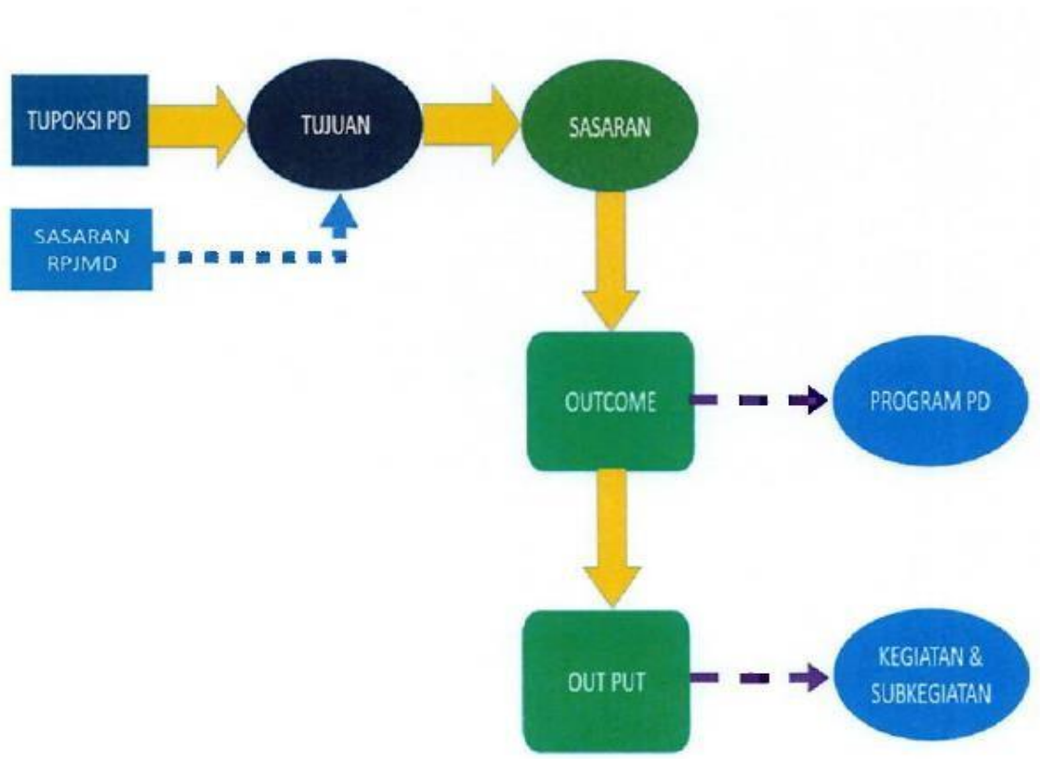

Tabel 4.2
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kotaanyar

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kabupaten | | |
| | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP | Persentase Kenaikan LHE AKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | |
| | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan/Material | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | | Pemeliharaan/Reh a bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Meningkatnya Kinerja Layanan umum Kecamatan | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | | | Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan **penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah**, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

## TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.444.006.086,15 | | 2.471.167.073,88 | | 2.507.995.397,73 | | 2.559.169.733,83 | | 2.619.179.454,3 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.323.543.886,15 | | 2.349.366.140,58 | | 2.384.379.239,45 | | 2.433.031.252,41 | | 2.490.083.163,98 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 100 | 100 | 2.323.543.886,15 | 100 | 2.349.366.140,58 | 100 | 2.384.379.239,45 | 100 | 2.433.031.252,41 | 100 | 2.490.083.163,98 | 7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Kotaanyar | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3.680.000 | | 4.520.000 | | 5.300.300 | | 6.080.000 | | 6.680.000 | | |
| Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 69,4 | 69,5 | 3.680.000 | 69,55 | 4.520.000 | 69,6 | 5.300.300 | 69,65 | 6.080.000 | 69,7 | 6.680.000 | | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 920.000 | | 1.200.000 | | 1.400.000 | | 1.600.000 | | 1.800.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 69,4 | 69,5 | 920.000 | 69,55 | 1.200.000 | 69,6 | 1.400.000 | 69,65 | 1.600.000 | 69,7 | 1.800.000 | | |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 460.000 | | 640.000 | | 920.300 | | 1.200.000 | | 1.300.000 | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 69,4 | 69,5 | 460.000 | 69,55 | 640.000 | 69,6 | 920.300 | 69,65 | 1.200.000 | 69,7 | 1.300.000 | | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1.380.000 | | 1.480.000 | | 1.580.000 | | 1.680.000 | | 1.780.000 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 69,4 | 69,5 | 1.380.000 | 69,55 | 1.480.000 | 69,6 | 1.580.000 | 69,65 | 1.680.000 | 69,7 | 1.780.000 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 920.000 | | 1.200.000 | | 1.400.000 | | 1.600.000 | | 1.800.000 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 69,4 | 69,5 | 920.000 | 69,55 | 1.200.000 | 69,6 | 1.400.000 | 69,65 | 1.600.000 | 69,7 | 1.800.000 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.057.928.498 | | 2.100.464.452,58 | | 2.111.301.651,45 | | 2.154.673.964,41 | | 2.206.545.875,98 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersusunnya Laporan Keuangan perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 69,4 | 69,5 | 2.057.928.498 | 69,55 | 2.100.464.452,58 | 69,6 | 2.111.301.651,45 | 69,55 | 2.154.673.964,41 | 69,7 | 2.206.545.875,98 | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.029.628.498 | | 2.070.134.452,58 | | 2.078.941.651,45 | | 2.118.283.964,41 | | 2.166.105.875,98 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 69,4 | 69,5 | 2.029.628.498 | 69,55 | 2.070.134.452,58 | 69,6 | 2.078.941.651,45 | 69,65 | 2.118.283.964,41 | 69,7 | 2.166.105.875,98 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 26.000.000 | | 28.000.000 | | 30.000.000 | | 34.000.000 | | 38.000.000 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 69,4 | 69,5 | 26.000.000 | 69,55 | 28.000.000 | 69,6 | 30.000.000 | 69,65 | 34.000.000 | 69,7 | 38.000.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 460.000 | | 470.000 | | 480.000 | | 490.000 | | 520.000 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 69,4 | 69,5 | 460.000 | 69,55 | 470.000 | 69,6 | 480.000 | 69,65 | 490.000 | 69,7 | 520.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 920.000 | | 930.000 | | 940.000 | | 950.000 | | 960.000 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 69,4 | 69,5 | 920.000 | 69,55 | 930.000 | 69,6 | 940.000 | 69,55 | 950.000 | 69,7 | 960.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 920.000 | | 930.000 | | 940.000 | | 950.000 | | 960.000 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 69,4 | 69,5 | 920.000 | 69,55 | 930.000 | 69,6 | 940.000 | 69,65 | 950.000 | 69,7 | 960.000 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 41.535.600,15 | | 20.890.200 | | 41.030.000 | | 42.300.000 | | 43.650.000 | | |
| Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 69,4 | 69,5 | 41.535.600,15 | 69,55 | 20.890.200 | 69,6 | 41.030.000 | 69,65 | 42.300.000 | 69,7 | 43.650.000 | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.706.200 | | 4.750.200 | | 4.780.000 | | 4.800.000 | | 4.900.000 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 69,4 | 69,5 | 6.706.200 | 69,55 | 4.750.200 | 69,6 | 4.780.000 | 69,65 | 4.800.000 | 69,7 | 4.900.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.235.800 | | 4.240.000 | | 4.250.000 | | 4.300.000 | | 4.350.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 69,4 | 69,5 | 4.235.800 | 69,55 | 4.240.000 | 69,6 | 4.250.000 | 69,65 | 4.300.000 | 69,7 | 4.350.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.229.800 | | 7.300.000 | | 7.400.000 | | 7.500.000 | | 7.600.000 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 69,4 | 69,5 | 7.229.800 | 69,55 | 7.300.000 | 69,6 | 7.400.000 | 69,65 | 7.500.000 | 69,7 | 7.600.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 20.865.000 | | 2.100.000 | | 22.000.000 | | 23.000.000 | | 24.000.000 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 69,4 | 69,5 | 20.865.000 | 69,55 | 2.100.000 | 69,6 | 22.000.000 | 69,65 | 23.000.000 | 69,7 | 24.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.498.800,15 | | 2.500.000 | | 2.600.000 | | 2.700.000 | | 2.800.000 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 69,4 | 69,5 | 2.498.800,15 | 69,55 | 2.500.000 | 69,6 | 2.600.000 | 69,65 | 2.700.000 | 69,7 | 2.800.000 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 34.347.000 | | 35.347.000 | | 36.347.000 | | 37.347.000 | | 38.347.000 | | |
| Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 69,4 | 69,5 | 34.347.000 | 69,55 | 35.347.000 | 69,6 | 36.347.000 | 69,65 | 37.347.000 | 69,7 | 38.347.000 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 34.347.000 | | 35.347.000 | | 36.347.000 | | 37.347.000 | | 38.347.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 69,4 | 69,5 | 34.347.000 | 69,55 | 35.347.000 | 69,6 | 36.347.000 | 69,65 | 37.347.000 | 69,7 | 38.347.000 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 168.756.788 | | 170.728.488 | | 172.864.288 | | 174.984.288 | | 177.104.288 | | |
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 69,4 | 69,5 | 168.756.788 | 69,55 | 170.728.488 | 69,6 | 172.864.288 | 69,65 | 174.984.288 | 69,7 | 177.104.288 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.864.200 | | 6.964.200 | | 7.000.000 | | 7.020.000 | | 7.040.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 69,4 | 69,5 | 6.864.200 | 69,55 | 6.964.200 | 69,6 | 7.000.000 | 69,65 | 7.020.000 | 69,7 | 7.040.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 39.228.300 | | 40.000.000 | | 41.000.000 | | 42.000.000 | | 43.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 69,4 | 69,5 | 39.228.300 | 69,55 | 40.000.000 | 69,6 | 41.000.000 | 69,65 | 42.000.000 | 69,7 | 43.000.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.200.000 | | 1.300.000 | | 1.400.000 | | 1.500.000 | | 1.600.000 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 69,4 | 69,5 | 1.200.000 | 69,55 | 1.300.000 | 69,6 | 1.400.000 | 69,65 | 1.500.000 | 69,7 | 1.600.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 121.464.288 | | 122.464.288 | | 123.464.288 | | 124.464.288 | | 125.464.288 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 69,4 | 69,5 | 121.464.288 | 69,55 | 122.464.288 | 69,6 | 123.464.288 | 69,65 | 124.464.288 | 69,7 | 125.464.288 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 17.296.000 | | 17.416.000 | | 17.536.000 | | 17.646.000 | | 17.756.000 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | 17.296.000 | | 17.416.000 | | 17.536.000 | | 17.646.000 | | 17.756.000 | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 69,4 | 69,5 | | 69,55 | | 69,6 | | 69,65 | | 69,7 | | | |
| 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 7.000.000 | | 7.020.000 | | 7.040.000 | | 7.050.000 | | 7.060.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 69,4 | 69,5 | 7.000.000 | 69,55 | 7.020.000 | 69,6 | 7.040.000 | 69,65 | 7.050.000 | 69,7 | 7.060.000 | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.296.000 | | 10.396.000 | | 10.496.000 | | 10.596.000 | | 10.696.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 69,4 | 69,5 | 10.296.000 | 69,55 | 10.396.000 | 69,6 | 10.496.000 | 69,65 | 10.596.000 | 69,7 | 10.696.000 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 8.951.200 | | 9.050.677,43 | | 9.185.561,58 | | 9.372.988,17 | | 9.592.774,45 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 8.951.200 | 100 | 9.050.677,43 | 100 | 9.185.561,58 | 100 | 9.372.988,17 | 100 | 9.592.774,45 | 7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Kotaanyar | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 8.951.200 | | 9.050.677,43 | | 9.185.561,58 | | 9.372.988,17 | | 9.592.774,45 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik selama satu tahun | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 100 | 100 | 8.951.200 | 100 | 9.050.677,43 | 100 | 9.185.561,58 | 100 | 9.372.988,17 | 100 | 9.592.774,45 | | |
| | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 2.340.000 | | 4.230.000 | | 4.230.000 | | 4.230.000 | | 4.230.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 100 | 100 | 2.340.000 | 100 | 4.230.000 | 100 | 4.230.000 | 100 | 4.230.000 | 100 | 4.230.000 | | |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 6.611.200 | | 4.820.677,43 | | 4.955.561,58 | | 5.142.988,17 | | 5.362.774,45 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 100 | 100 | 6.611.200 | 100 | 4.820.677,43 | 100 | 4.955.561,58 | 100 | 5.142.988,17 | 100 | 5.362.774,45 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 11.396.000 | | 11.522.647,24 | | 11.694.371,68 | | 11.932.989,22 | | 12.212.804,72 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 11.396.000 | 100 | 11.522.647,24 | 100 | 11.694.371,68 | 100 | 11.932.989,22 | 100 | 12.212.804,72 | 7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Kotaanyar | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 8.996.000 | | 9.022.647,24 | | 4.400.000 | | 9.232.989,22 | | 9.412.804,72 | | |
| Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Perekonomian Masyarakat di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 100 | 100 | 8.996.000 | 100 | 9.022.647,24 | 100 | 4.400.000 | 100 | 9.232.989,22 | 100 | 9.412.804,72 | | |
| | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 7.396.000 | | 7.322.647,24 | | 2.600.000 | | 2.700.000 | | 7.412.804,72 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 100 | 100 | 7.396.000 | 100 | 7.322.647,24 | 100 | 2.600.000 | 100 | 2.700.000 | 100 | 7.412.804,72 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1.600.000 | | 1.700.000 | | 1.800.000 | | 6.532.989,22 | | 2.000.000 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 100 | 100 | 1.600.000 | 100 | 1.700.000 | 100 | 1.800.000 | 100 | 6.532.989,22 | 100 | 2.000.000 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 2.400.000 | | 2.500.000 | | 7.294.371,68 | | 2.700.000 | | 2.800.000 | | |
| Meningkatnya Kwalitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi,sosial dan lingkungan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 100 | 100 | 2.400.000 | 100 | 2.500.000 | 100 | 2.600.000 | 100 | 2.700.000 | 100 | 2.800.000 | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 2.400.000 | | 2.500.000 | | 2.600.000 | | 2.700.000 | | 2.800.000 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 100 | 100 | 2.400.000 | 100 | 2.500.000 | 100 | 2.600.000 | 100 | 2.700.000 | 100 | 2.800.000 | | |
| terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.694.371,68 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 0 | | 0 | | 4.694.371,68 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.694.371,68 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 61.113.000 | | 61.792.167,48 | | 62.713.069,17 | | 63.992.696,59 | | 65.493.255,07 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 61.113.000 | 100 | 61.792.167,48 | 100 | 62.713.069,17 | 100 | 63.992.696,59 | 100 | 65.493.255,07 | 7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Kotaanyar | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 61.113.000 | | 61.792.167,48 | | 62.713.069,17 | | 63.992.696,59 | | 65.493.255,07 | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 69,4 | 69,45 | 61.113.000 | 69,45 | 61.792.167,48 | 69,5 | 62.713.069,17 | 69,55 | 63.992.696,59 | 60,6 | 65.493.255,07 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 69,4 | 69,45 | | 69,45 | | 69,5 | | 69,55 | | 60,6 | | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 58.713.000 | | 41.228.197,48 | | 46.003.563,17 | | 46.621.000 | | 47.361.561,07 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 69,4 | 69,45 | 58.713.000 | 69,45 | 41.228.197,48 | 69,5 | 46.003.563,17 | 69,55 | 46.621.000 | 60,6 | 47.361.561,07 | | |
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 2.400.000 | | 20.563.970 | | 16.709.506 | | 17.371.696,59 | | 18.131.694 | | |
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 69,4 | 69,45 | 2.400.000 | 69,45 | 20.563.970 | 69,5 | 16.709.506 | 69,55 | 17.371.696,59 | 60,6 | 18.131.694 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 31.262.000 | | 31.609.424,17 | | 32.080.506,08 | | 32.735.092,05 | | 33.502.694,02 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 31.262.000 | 100 | 31.609.424,17 | 100 | 32.080.506,08 | 100 | 32.735.092,05 | 100 | 33.502.694,02 | 7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Kotaanyar | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 31.262.000 | | 31.609.424,17 | | 32.080.506,08 | | 32.735.092,05 | | 33.502.694,02 | | |
| Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Tingkat Kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 100 | 6 | 31.262.000 | 6 | 31.609.424,17 | 6 | 32.080.506,08 | 6 | 32.735.092,05 | 6 | 33.502.694,02 | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 31.262.000 | | 31.609.424,17 | | 32.080.506,08 | | 32.735.092,05 | | 33.502.694,02 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 100 | 6 | 31.262.000 | 6 | 31.609.424,17 | 6 | 32.080.506,08 | 6 | 32.735.092,05 | 6 | 33.502.694,02 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 7.740.000 | | 7.826.016,98 | | 7.942.649,77 | | 8.104.715,39 | | 8.294.762,06 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 7.740.000 | 100 | 7.826.016,98 | 100 | 7.942.649,77 | 100 | 8.104.715,39 | 100 | 8.294.762,06 | 7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Kotaanyar | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 7.740.000 | | 7.826.016,98 | | 7.942.649,77 | | 8.104.715,39 | | 8.294.762,06 | | |
| Terwujudnya Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 13 | 13 | 7.740.000 | 13 | 7.826.016,98 | 13 | 7.942.649,77 | 13 | 8.104.715,39 | 13 | 8.294.762,06 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | 7.740.000 | | 7.826.016,98 | | 7.942.649,77 | | 8.104.715,39 | | 8.294.762,06 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 13 | 13 | 7.740.000 | 13 | 7.826.016,98 | 13 | 7.942.649,77 | 13 | 8.104.715,39 | 13 | 8.294.762,06 | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah**.** Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| 3 | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan Umum di Wilayah Kecamatan | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| 4 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Tingkat Kecamatan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Ke | |
| 5 | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan | Terwujudnya Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang Bersih dan Baik | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kotaanyarsebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kotaanyar

| NO | INDIKATOR | SATUAN | *BASELINE* 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 72,21 | 72,25 | 73,66 | 74,40 | 75,14 | 75,89 | 76,65 | Nilai LHE AKIP oleh APIP |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan | Nilai | 84,28 | 85,12 | 85,97 | 86,83 | 87,70 | 88,58 | 89,46 | Nilai SKM e SUKMA Prop Jatim |

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)** adalah **ukuran keberhasilan yang bersifat operasional** dan digunakan untuk menilai capaian **kinerja kegiatan atau sub kegiatan** dalam rangka mendukung pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** perangkat daerah. **Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kotaanyar sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini**

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

| NO | INDIKATOR | SATUAN | *BASELINE* 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan | Nilai | 84,28 | 85,12 | 85,97 | 86,83 | 87,70 | 88,58 | 89,46 | Nilai SKM e Sukma Prop Jatim |

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Kotaanyar.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Kotaanyar.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 2025

**Camat Kotaanyar**

**HARI PRIBADI,S.STP.M,Si**
**Pembina Tk.I**
**NIP. 19810403 199912 1 001**

Pemerintah
Kabupaten Probolinggo

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# RENSTRA

# RENCANA STRATEGI KECAMATAN KRAKSAAN TAHUN 2025 - 2029

#bangga melayani bangsa

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kraksaan Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo . Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Kraksaan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Kraksaan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kraksaan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Kraksaan dengan Kecamatan dan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Kraksaan,  September 2025

**CAMAT KRAKSAAN**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**PUJA KURNIAWAN, S.STP., M.Si.**
Pembina Tingkat 1
NIP. 19820223 200112 1 003

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4
1.4 Sistematika Penulisan ..... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 8
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kraksaan ..... 8
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Kraksaan ..... 8
B. Sumber Daya Kecamatan Kraksaan ..... 15
C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kraksaan ..... 19
D. Kelompok Sasaran Layanan ..... 20
2.2 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Kraksaan ..... 20
2.2.1 Permasalahan Kecamatan Kraksaan ..... 20
2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Kraksaan ..... 21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 23
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ..... 23
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ..... 24
3.3 Strategi Kecamatan Kraksaan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 28
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Kraksaan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 29
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 31
4.1 Uraian Program ..... 31
4.2 Uraian Kegiatan ..... 35
BAB V PENUTUP ..... 68

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.1.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..……..… 16
Tabel 2.1.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ……..…… 17
Tabel 2.1.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..... 17
Tabel 2.2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Kraksaan ……..… 22
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 26
Tabel 3.3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kraksaan Tahun 2025-2029 27
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Kraksaan ……..... 29
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Kecamatan Kraksaan …… 30
Tabel 4.1 Program Kecamatan Kraksaan ……. 33
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kraksaan ……. 36
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kraksaan ……. 50
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… 66
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kraksaan …….. 66
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kraksaan …… 67

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dan Rencana Strategis Kecamatan Kraksaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... 2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kraksaan ..... 15
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ..... 24
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah ..... 25
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kraksaan ..... 36

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Kraksaan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kraksaan setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Kraksaan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Kraksaan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Kraksaan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Kraksaan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kraksaan yang disusun pada periode

Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Kraksaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Kraksaan berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Kraksaan dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Kraksaan disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Kraksaan akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Kraksaan dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Kraksaan untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Kraksaan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini dapat dilihat dari bagan tersebut di bawah :

**Gambar 1.1**
Keterkaitan RPJMD dan Rencana Strategis Kecamatan Kraksaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

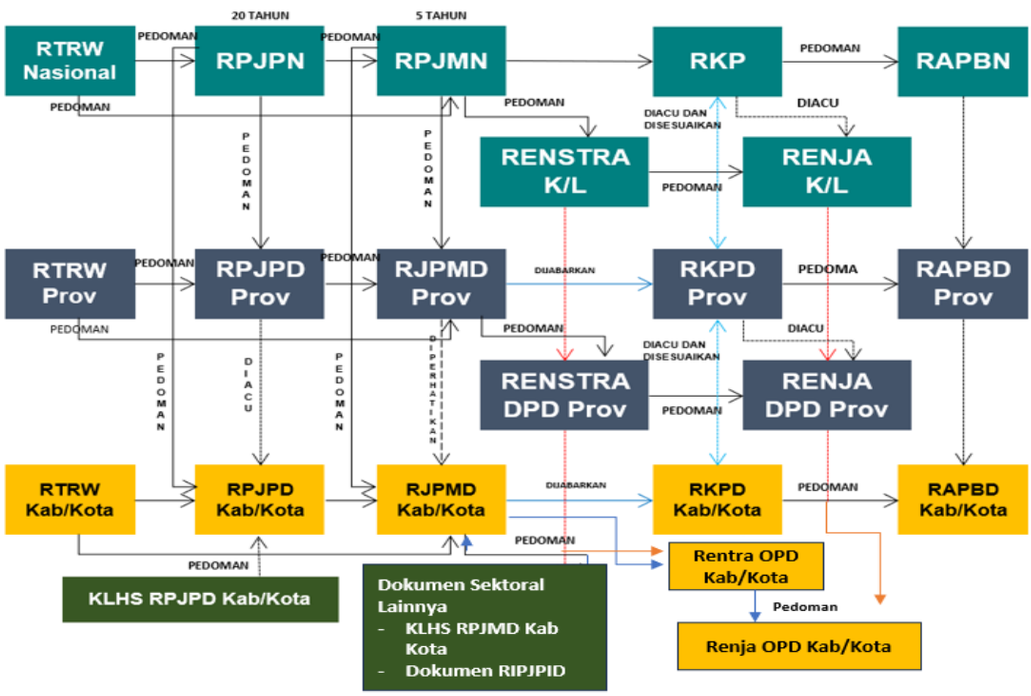


## 2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar 1945;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
f. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 ;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan dan pembangunan keuangan daerah ;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;

n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

o. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;

p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat ;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2045 ;

s. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ;

t. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ;

u. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 ;

**3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan.
5. Menungkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public serta pembangunan wilayah melalui perencanaan yang sistematis

**4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KRAKSAAN**

1. Subbab Gambaran Pelayanan Kecamatan Kraksaan paling sedikit memuat:
   a. Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Kraksaan;
   b. Sumber daya Kecamatan Kraksaan;
   c. Kinerja pelayanan Kecamatan Kraksaan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
   d. Kelompok sasaran layanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kraksaan paling sedikit memuat:
   a. Permasalahan pelayanan Kecamatan Kraksaan; dan
   b. Isu strategis.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra Kecamatan Kraksaan Tahun 2025 – 2029;
2. Sasaran Renstra Kecamatan Kraksaan Tahun 2025 – 2029;
3. Strategi Kecamatan Kraksaan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kraksaan Tahun 2025 – 2029; dan

4. Arah kebijakan Kecamatan Kraksaan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kraksaan Tahun 2025 – 2029.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kraksaan 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kraksaan; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Kraksaan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### 1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Kraksaan

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Kraksaan Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;

b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan,

kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. Lurah**

Lurah mempunyai tugas membantu sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
d. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
f. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
g. pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9.1 Sekretaris Kelurahan**

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum

dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;

c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kelurahan;
d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja Kelurahan pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.

**9.2 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan pengumpulan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban;

a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban;
b. pelaksanaan kegiatan pertahanan sipil;
c. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan rukun warga;
d. pelaksanaan pelayanan dan membantu masyarakat dibidang perijinan;
e. pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka

mencegah timbulnya gangguan, ketentraman dan ketertiban;

f. pelaksanaan pembinaan dan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
g. pelaksanaan pengumpulan bahan dan menyusun pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.

### 9.3 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pengumpulan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;
2. pelaksanaan pembinaan terhadap perkoperasian pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. pelaksanaan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
4. pelaksanaan peran serta swadaya masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;
5. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasana fisik dilingkungan kelurahan;
6. pelaksanaan kegiatan membantu, membina dan menyiapkan bahan dalam rangka musyarawah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) ;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.

### 9.4 Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Kelurahan

Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang pemerintahan dan kesejahteraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi

a. pelaksanaan pengumpulan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan dan kesejahteraan;
b. pelaksanaan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
c. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan;
d. pelaksanaan tugas dibidang Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau retribusi daerah di wilayah Kelurahan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum ;
f. pelaksanaan kegiatan membantu tugas dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. pelaksanaan pengumpulan bahan untuk membuat laporan dibidang pemerintahan dan kesejahteraan antara lain bahan Keputusan Lurah;
h. pelaksanaan pengumpulan bahan dalam rangka pengesahan dan pengangkatan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW);
i. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan;
j. pelaksanaan pembinaan dibidang pemerintahan dan kesejahteraan yang meliputi keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
k. pelaksanaan kegiatan membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana atau bantuan terhadap korban bencana alam serta bencana lainnya;
l. pelaksanaan kegiatan PKK, Karang Taruna, Pramuka serta organisasi kemasyarakatan lainnya;
m. pelaksanaan kegiatan pengumpulan zakat, infag dan shadaqoh;

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.

**8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Kraksaan**

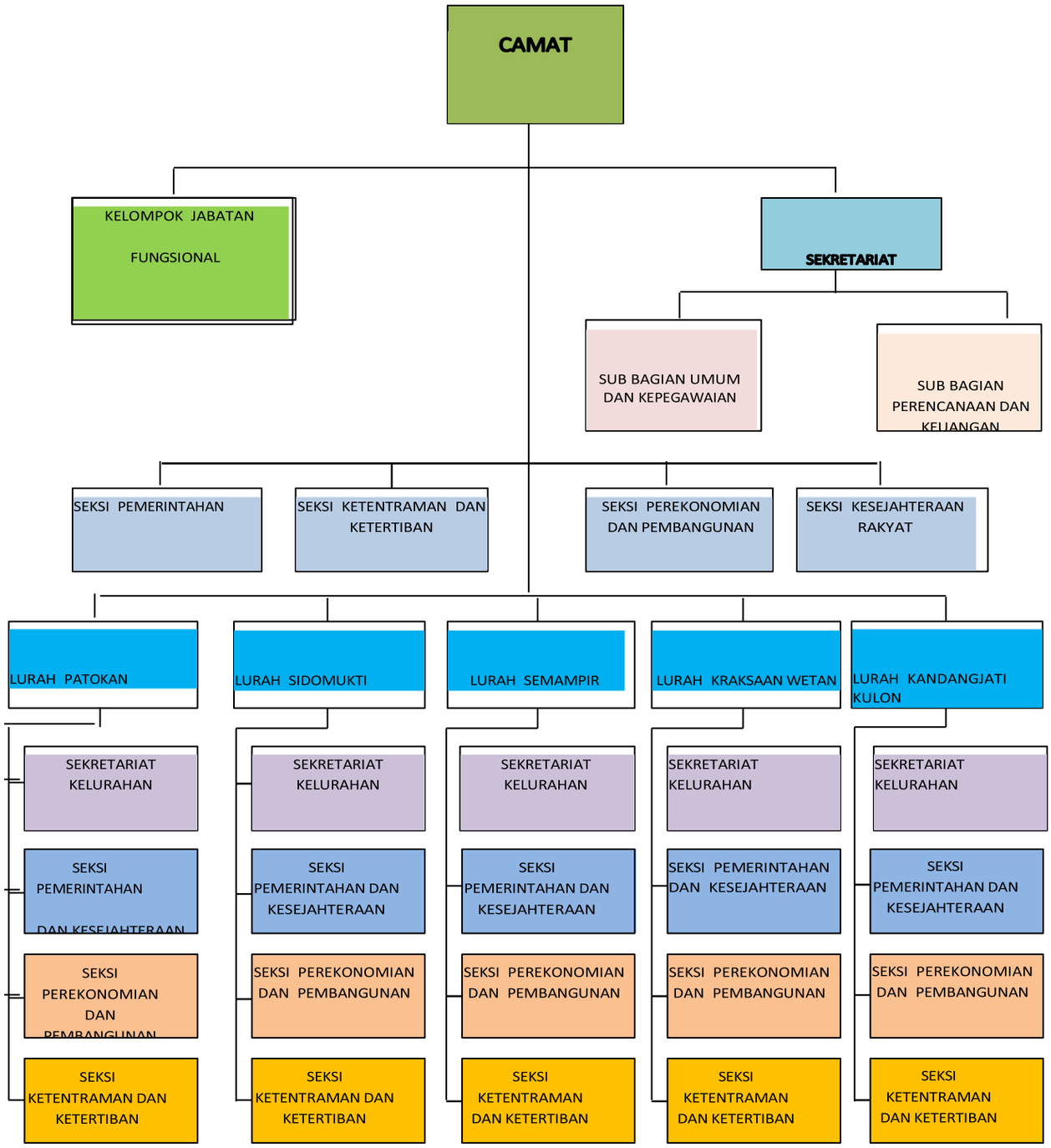


Struktur Organisasi Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Lurah
   a. Sekretaris Kelurahan
   b. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
   c. Seksi Ketentraman dab Ketertiban Umum Kelurahan
   d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Sumber Daya Kecamatan Kraksaan

### 2.1 Gambaran Umum

Kecamatan Kraksaan merupakan salah satu kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo yang mempunyai luas wilayah 37,89 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 68.551 jiwa yang tersebar di 13 Desa dan 5 Kelurahan . Secara administratif, batas Wilayah Kecamatan Kraksaan sebagai berikut:

- Sebelah utara : Selat Madura;
- Sebelah timur : Kecamatan Paiton;
- Sebelah selatan : Kec. Besuk dan Kec. Krejengan
- Sebelah barat : Kecamatan Pejarakan. Kecamatan

Kraksaan terdiri dari 13 (Tigabelas) desa dan 5 (lima) Kelurahan, yaitu:

1. Desa Kregenan
2. Desa Rondo Kuning
3. Desa Asembagus
4. Desa Bulu
5. Desa Kali Buntu
6. Desa Sidopokso
7. Desa Rangkang
8. Desa Sumber Lele
9. Desa Kebonagung
10. Desa Asembakor
11. Desa Taman Sari
12. Desa Alas Sumur Kulon
13. Desa Kandangjati Wetan
14. Kelurahan Semampir
15. Kelurahan Patokan
16. Kelurahan Sidomukti
17. Kelurahan Kraksaan Wetan

18. Kelurahan Kandangjati Kulon

Kecamatan Kraksaan telah ditetapkan menjadi ibu kota pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo (Ibu kota kabupaten) sejak tahun 2010 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 02. Kecamatan kraksaan secara ekonmi meliputi :

1. Daerah Pertanian,
2. Daerah Perikanan,
3. Daerah Perdagangan dan Jasa,
4. Daerah Pariwisata

secara umum sebagai ibu kota kabupaten memiliki Sarana dan fasilitas yaitu :

1. Pendidikan: Fasilitas pendidikan di Kraksaan cukup lengkap, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Beberapa contohnya termasuk TK Negeri Pembina, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, dan Universitas Zainul Hasan,
2. Fasilitas umum: Sebagai ibu kota, Kraksaan dilengkapi dengan berbagai fasilitas perkotaan, seperti gedung pemerintahan, Islamic Centre, Masjid Agung, Polres Probolinggo, dan ,GOR Sasana Krida

## 2.2 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Kraksaan.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Kraksaan dan Kelurahan sebanyak 65 orang dengan rincian : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 42 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 1 orang perempuan. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 25 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Kraksaan berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| **Pegawai yang berada di Kantor Kecamatan Kraksaan** | | | | | | | | | | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **1** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | **4** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | **3** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | **3** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | **3** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | **3** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 10. | Honorer | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | **6** |
| **Pegawai yang berada di Kantor Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan** | | | | | | | | | | |
| | Lurah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Sekretaris Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| | Seksi Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Honorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| **Pegawai yang berada di Kantor Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan** | | | | | | | | | | |
| | Lurah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Sekretaris Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Seksi Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Honorer | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | **3** |
| **Pegawai yang berada di Kantor Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan** | | | | | | | | | | |
| | Lurah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Sekretaris Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Seksi Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Honorer | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | **4** |
| **Pegawai yang berada di Kantor Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan** | | | | | | | | | | |
| | Lurah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Sekretaris Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Seksi Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Honorer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| **Pegawai yang berada di Kantor Kelurahan Kandangjati Kulon Kecamatan Kraksaan** | | | | | | | | | | |
| | Lurah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Sekretaris Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Seksi Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | **1** |
| | Honorer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| **Jumlah** | | **0** | **1** | **12** | **0** | **46** | **6** | **11** | **5** | **65** |

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Kraksaan, data diolah April 2024*

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 3 | 29 | 2 | - | 13 | **47** | 1 | 16 | 8 | 13 | **47** |
| 2. | Perempuan | - | - | 8 | - | 1 | 9 | **18** | - | 5 | 4 | 9 | **18** |
| **Jumlah** | | **-** | **3** | **35** | **2** | **1** | **22** | **65** | **1** | **5** | **8** | **22** | **65** |

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Kraksaan, data diolah April 2024*

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.3

Jumlah Sarana Prasarana

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak Berat (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Lain-lain Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Lain-lain tugu/tanda batas | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Portable Generating Set | 6 | 6 | 0 |
| 9 | Genset | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kursi Kerja | 17 | 16 | 0 |
| 11 | Kursi Lipat | 20 | 20 | 0 |
| 12 | P.C Unit | 20 | 18 | 2 |
| 13 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 20 | 18 | 2 |
| 14 | Sepeda Motor | 17 | 17 | 0 |
| 15 | Sport Utility Vehicle (SUV)/ RUSH | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Lemari Besi/Metal | 8 | 8 | 0 |
| 18 | Lemari Kayu | 8 | 8 | 0 |
| 19 | Filing Cabinet Besi | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Brandkas | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Lemari Kaca | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Alat Penghancur Kertas | 8 | 7 | 1 |
| 23 | Mesin Absensi | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Papan Pengumuman | 7 | 7 | 0 |
| 25 | Meja Kerja Kayu | 30 | 30 | 0 |
| 26 | Kursi Besi/Metal | 8 | 8 | 0 |
| 27 | Meja Rapat | 12 | 12 | 0 |
| 28 | Meja Resepsionis | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Meja 1/2 Biro | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Kasur/Spring Bed | 2 | 2 | 0 |
| 31 | Kursi Rapat | 500 | 500 | 0 |
| 32 | Kursi Tamu | 9 | 9 | 0 |
| 33 | Bangku Tunggu | 2 | 2 | 0 |
| 34 | Filling Besi/Metal | 2 | 2 | 0 |
| 35 | Lemari Es | 1 | 1 | 0 |
| 36 | A.C. Window | 3 | 3 | 0 |
| 37 | A.C. Split | 12 | 12 | 0 |
| 38 | A.C. Unit | 2 | 2 | 0 |
| 39 | Kipas Angin | 25 | 25 | 0 |
| 40 | Televisi | 6 | 6 | 0 |
| 41 | Sound System | 7 | 7 | 0 |
| 42 | Dispenser | 14 | 14 | 0 |
| 43 | Mimbar/Podium | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Karpet | 5 | 5 | 0 |
| 46 | Mesin Pompa Air | 8 | 8 | 0 |
| 47 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Meja Tamu Biasa | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 20 | 20 | 0 |
| 52 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Camera Electronic | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Layar Film/Projector | 6 | 6 | 0 |
| 55 | Wireless Amplifier | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Antene SHF Portable | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Termometer Mercury Untuk Suhu Badan | 3 | 3 | 0 |
| 58 | Lap Top | 13 | 13 | 0 |
| 59 | Note Book | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 3 | 3 | 0 |
| 61 | External/ Portable Hardisk | 3 | 3 | 0 |
| 62 | Hard disk Eksternal | 7 | 7 | 0 |
| 64 | Monitor | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1 | 0 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Lain-lain Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Jam Elektronik | 6 | 0 | 6 |

*Sumber: Data Aset dan Barjas Kecamatan Kraksaan, data diolah April 2024*

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kraksaan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kraksaan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Kraksaan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Kraksaan dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

**Tabel 2.3.1**

misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

| VISI DAERAH | MISI 1 | TUJUAN 1 | SASARAN/INDIKATOR | TUJUAN KECAMATAN/INDIKATOR | SASARAN/ INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing | **1. SAE PEMERINTAHAN** (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif) | 1.Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional | 1.Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | 1. Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif" | 1. meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi perangkat daerah |
| | | | *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* | *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* | *Persentase Kenaikan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah* |
| | | | | | 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan |
| | | | | | *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* |

**Tabel 2.3.2**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kraksaan**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | SPM | Target Indikator Lainnya | Realisasi 2020 | Target Renstra perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | 81,96% | 84,73% | 84,28% | | 0,82% | 0,85% | 0,84% | 5,7% | 81% |
| 2 | Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | 86.91% | 93,4% | 95% | | 0,87% | 0,93% | 0,95% | 8,9% | 90% |
| 3 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | 95% | 99% | 99,75% | | 0,95% | 0,99% | 1% | 2,10% | 93% |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | | | | | | | | 100% | 100% | | 0% | 0% | 90% | | 0% | 0% | 0,90% | 0% | 0% |
| 5 | Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah | | | | | | | 80 | 80 | 80 | | 71,71 | 71,71 | 71.71 | | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 2,5% | 71 |

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | **3,349,317,596.00** | **6,486,643,698.00** | **7,221,433,038.00** | **-** | **-** | **3,213,486,442.00** | **5,759,937,366.00** | **6,625,666,272.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **95.94** | **88.80** | **91.75** | | |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | - | | **9,200,000.00** | **6,750,000.00** | **6,400,000.00** | **-** | **-** | **8,440,000.00** | **8,807,500.00** | **4,957,500.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **91.74** | **130.48** | **77.46** | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 1,100,000.00 | 1,200,000.00 | 1,600,000.00 | | | 1,100,000.00 | 4,320,000.00 | 1,600,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 360.00 | 100.00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | 1,100,000.00 | 900,000.00 | 800,000.00 | | | 1,100,000.00 | 1,929,000.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 214.33 | 0.00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | 1,100,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | | | 997,500.00 | - | 790,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.68 | 0.00 | 98.75 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | 1,100,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | | | 997,500.00 | 756,000.00 | 790,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.68 | 94.50 | 98.75 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | 1,300,000.00 | 900,000.00 | 800,000.00 | | | 997,500.00 | - | 592,500.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 76.73 | 0.00 | 74.06 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | 1,100,000.00 | 900,000.00 | 800,000.00 | | | 997,500.00 | 885,000.00 | 592,500.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.68 | 98.33 | 74.06 | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 2,400,000.00 | 1,250,000.00 | 800,000.00 | | | 2,250,000.00 | 917,500.00 | 592,500.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.75 | 73.40 | 74.06 | | |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **-** | **-** | **3,040,332,000.00** | **6,063,223,598.00** | **5,854,604,704.00** | **-** | **-** | **2,960,663,745.00** | **5,354,962,796.00** | **5,534,982,495.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **97.38** | **88.32** | **94.54** | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | 3,019,622,000.00 | 5,404,122,466.00 | 5,807,144,704.00 | - | - | 2,941,043,745.00 | 4,758,083,104.00 | 5,489,507,495.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.40 | 88.05 | 94.53 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | 4,500,000.00 | 653,001,132.00 | 40,860,000.00 | - | - | 4,500,000.00 | 590,874,692.00 | 38,760,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 90.49 | 94.86 | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | 2,400,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | - | - | 2,250,000.00 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.75 | 98.75 | 98.75 | | |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | - | - | 900,000.00 | - | - | - | - | 885,000.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98.33 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | 2,910,000.00 | 900,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | 2,750,000.00 | 885,000.00 | 987,500.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.50 | 98.33 | 98.75 | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | - | 4,630,000.00 | 900,000.00 | 800,000.00 | - | - | 4,250,000.00 | 885,000.00 | 987,500.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91.79 | 98.33 | 123.44 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | 2,860,000.00 | 900,000.00 | 2,400,000.00 | - | - | 2,620,000.00 | 885,000.00 | 2,370,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91.61 | 98.33 | 98.75 | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | 3,410,000.00 | 900,000.00 | 800,000.00 | - | - | 3,250,000.00 | 885,000.00 | 790,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.31 | 98.33 | 98.75 | | |
| **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **-** | **-** | **-** | **1,600,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,590,000.00** | | | | | | | |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | - | - | | 800,000.00 | | | | - | 800,000.00 | | | | | | | |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | 800,000.00 | | | | - | 790,000.00 | | | | | | | |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | - | - | | 800,000.00 | | | | - | 800,000.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | - | - | - | **16,586,000.00** | - | - | - | - | **16,546,000.00** | | | | | | | |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | - | - | - | 16,586,000.00 | | | | | 16,546,000.00 | | | | | | | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **-** | **-** | **37,110,200.00** | **159,972,800.00** | **217,236,400.00** | **-** | **-** | **27,294,697.00** | **144,625,400.00** | **202,179,606.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **73.55** | **90.41** | **93.07** | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | 2,440,700.00 | 2,797,400.00 | 9,244,000.00 | - | - | 2,198,000.00 | 2,784,000.00 | 9,211,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.06 | 99.52 | 99.64 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 11,504,300.00 | 96,417,400.00 | 47,598,000.00 | - | - | 4,514,800.00 | 83,856,000.00 | 46,927,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 39.24 | 86.97 | 98.59 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | 4,510,800.00 | 33,928,000.00 | 7,947,500.00 | - | - | 2,360,000.00 | 32,118,400.00 | 7,375,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 52.32 | 94.67 | 92.80 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | - | 12,000,000.00 | 21,735,000.00 | 46,637,000.00 | - | - | 11,971,897.00 | 20,967,000.00 | 41,877,036.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.77 | 96.47 | 89.79 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | - | 600,000.00 | 2,095,000.00 | 8,190,000.00 | - | - | 550,000.00 | 2,000,000.00 | 2,520,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91.67 | 95.47 | 30.77 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | 6,054,400.00 | - | - | - | - | 5,700,000.00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.15 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | | - | - | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | | | | 2,900,000.00 | 11,800,000.00 | | | | 96.67 | | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | - | - | 75,746,000.00 | - | - | | - | 74,184,928.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.94 | | |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | - | 9,873,900.00 | | | | - | 8,284,642.00 | | | | #DIV/0! | | | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **-** | **-** | **13,596,000.00** | **31,587,000.00** | **103,082,000.00** | **-** | **-** | **12,153,000.00** | **31,050,000.00** | **102,801,000.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **89.39** | **98.30** | **99.73** | | |
| Pengadaan Mebel | - | - | 5,200,000.00 | 9,625,000.00 | 76,159,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 9,500,000.00 | 75,905,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96.15 | 98.70 | 281.93 | | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | 8,396,000.00 | 21,962,000.00 | 26,923,000.00 | - | - | 7,153,000.00 | 21,550,000.00 | 26,896,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 85.20 | 98.12 | 99.90 | | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **-** | **-** | **202,829,396.00** | **199,540,300.00** | **882,989,264.00** | **-** | **-** | **181,435,000.00** | **196,305,370.00** | **692,467,871.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **89.45** | **98.38** | **78.42** | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 995,000.00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.50 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | 29,471,100.00 | 114,485,300.00 | 114,500,000.00 | | - | 28,240,000.00 | 111,750,370.00 | 102,494,571.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.82 | 97.61 | 89.51 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 2,440,000.00 | 10,150,000.00 | - | | | 2,200,000.00 | 9,900,000.00 | | #DIV/0! | | 90.16 | | | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | 169,918,296.00 | 74,905,000.00 | 768,489,264.00 | | - | 150,000,000.00 | 74,655,000.00 | 589,973,300.00 | #DIV/0! | #REF! | 88.28 | 99.67 | 76.77 | | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **-** | **-** | **46,250,000.00** | **25,570,000.00** | **157,120,670.00** | **-** | **-** | **23,500,000.00** | **24,186,300.00** | **88,277,800.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **50.81** | **94.59** | **56.18** | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | 25,000,000.00 | 20,400,000.00 | 38,100,000.00 | | - | 23,500,000.00 | 19,016,300.00 | 36,277,800.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.00 | 93.22 | 95.22 | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | - | - | - | 13,970,000.00 | | | | | 13,970,000.00 | | | | | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | - | - | - | 52,750,670.00 | | | | | 52,564,000.00 | | | | | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | 21,250,000.00 | 5,170,000.00 | 52,300,000.00 | | - | - | 5,170,000.00 | 52,000,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 100.00 | 99.43 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN** | **-** | **-** | **85,240,000.00** | **40,095,200.00** | **32,795,000.00** | **-** | **-** | **80,420,000.00** | **33,145,000.00** | **31,973,500.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **94.35** | **82.67** | **97.50** | | |
| **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **-** | **-** | **57,040,000.00** | **29,395,200.00** | **16,230,000.00** | **-** | **-** | **55,020,000.00** | **25,550,000.00** | **15,580,000.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **96.46** | **86.92** | **96.00** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | **77,687,000.00** | **51,838,700.00** | **59,875,000.00** | **-** | **-** | **74,500,000.00** | **53,135,000.00** | **53,135,000.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **95.90** | **102.50** | **88.74** | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | - | 57,040,000.00 | 27,145,200.00 | 16,230,000.00 | - | - | 55,020,000.00 | 23,970,000.00 | 15,580,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96.46 | 88.30 | 96.00 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | - | 2,250,000.00 | - | - | - | - | 1,580,000.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 70.22 | #DIV/0! | | |
| **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **-** | **-** | **28,200,000.00** | **10,700,000.00** | **16,565,000.00** | **-** | **-** | **25,400,000.00** | **7,595,000.00** | **16,393,500.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **90.07** | **70.98** | **98.96** | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | - | - | 28,200,000.00 | 10,700,000.00 | - | - | - | 25,400,000.00 | 7,595,000.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.07 | 70.98 | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | - | - | - | 16,565,000.00 | - | - | - | - | 16,393,500.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98.96 | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | **130,360,000.00** | **361,747,800.00** | **69,375,000.00** | **-** | **-** | **122,987,500.00** | **246,287,000.00** | **61,409,500.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **94.34** | **68.08** | **88.52** | | |
| **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **-** | **-** | **80,360,000.00** | **311,747,800.00** | **19,375,000.00** | **-** | **-** | **76,850,000.00** | **200,149,500.00** | **18,642,500.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **95.63** | **64.20** | **96.22** | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | 2,960,000.00 | 18,147,800.00 | 10,825,000.00 | - | - | 2,850,000.00 | 5,160,000.00 | 10,825,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96.28 | 28.43 | 100.00 | | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | - | 77,400,000.00 | 222,050,000.00 | 8,550,000.00 | - | - | 74,000,000.00 | 194,989,500.00 | 7,817,500.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.61 | 87.81 | 91.43 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | - | 24,000,000.00 | 71,550,000.00 | - | | | 2,250,000.00 | 54,010,000.00 | | | | 9.38 | | | | |
| **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)** | **-** | **-** | **50,000,000.00** | **50,000,000.00** | **-** | **-** | **-** | **46,137,500.00** | **46,137,500.00** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **92.28** | **92.28** | **#DIV/0!** | | |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | - | - | 46,137,500.00 | 46,137,500.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 92.28 | 92.28 | #DIV/0! | | |
| **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50,000,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **42,767,000.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **85.53** | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | - | 25,000,000.00 | - | - | - | - | 20,221,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 80.88 | | |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | - | - | - | | 25,000,000.00 | | | | | 22,546,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.18 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | - | - | **77,687,000.00** | **51,838,700.00** | **53,875,000.00** | - | - | **74,500,000.00** | **53,135,000.00** | **53,135,000.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **95.90** | **102.50** | **98.63** | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata | - | - | 48,600,000.00 | 50,438,700.00 | 48,175,000.00 | - | - | 46,500,000.00 | 48,140,000.00 | 48,140,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.68 | 95.44 | 99.93 | | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | 29,087,000.00 | 1,400,000.00 | 5,700,000.00 | - | - | 28,000,000.00 | 4,995,000.00 | 4,995,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96.26 | 356.79 | 87.63 | | |
| **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah** | | | | | **6,000,000.00** | | | | | **6,000,000.00** | | | | | | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | - | **31,187,900.00** | **32,377,200.00** | **105,239,000.00** | - | - | **30,050,000.00** | - | **98,838,000.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **96.35** | - | **93.92** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 31,187,900.00 | 32,377,200.00 | 67,943,000.00 | - | - | 30,050,000.00 | - | 62,702,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96.35 | - | 92.29 | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | - | 31,187,900.00 | 32,377,200.00 | 67,943,000.00 | - | - | 30,050,000.00 | - | 62,702,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96.35 | 0.00 | 92.29 | | |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | 23,535,000.00 | | | | | 22,375,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.07 | | |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | 13,761,000.00 | | | | | 13,761,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | - | - | - | **37,900,000.00** | - | - | - | - | **37,114,000.00** | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.93 | | |
| **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan** | - | - | - | - | **37,900,000.00** | - | - | - | - | **37,114,000.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **97.93** | | |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | 12,540,000.00 | | | | | 11,890,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.82 | | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | 12,680,000.00 | | | | | 12,612,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.46 | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | 12,680,000.00 | | | | | 12,612,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.46 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | - | **3,044,605,000.000** | **3,044,605,000.00** | **2,478,410,000.00** | - | - | **2,865,627,600.000** | **2,857,702,600.000** | **2,484,052,500.00** | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.12 | 93.86 | 100.23 | | |
| **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patokan** | - | - | 608,921,000.00 | 608,921,000.00 | 494,080,000.00 | - | - | 578,955,000.00 | 575,430,000.00 | 466,574,700.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.08 | 94.50 | 94.43 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 4,350,000.00 | 4,350,000.00 | 3,150,000.00 | | | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 85.06 | 85.06 | 0.00 | | |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 268,954,000.00 | 268,954,000.00 | 78,040,000.00 | | | 260,900,000.00 | 260,900,000.00 | 77,440,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.01 | 97.01 | 99.23 | | |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 331,767,000.00 | 331,767,000.00 | 411,440,000.00 | | | 310,830,000.00 | 310,830,000.00 | 389,134,700.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.69 | 93.69 | 94.58 | | |
| Evaluasi Kelurahan | | | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | 1,450,000.00 | | | 3,525,000.00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 91.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| ***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sidomukti*** | - | - | 608,921,000.00 | 608,921,000.00 | 436,210,000.00 | - | - | 579,150,900.00 | 579,150,900.00 | 499,057,500.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.11 | 95.11 | 114.41 | | |
| *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan* | | | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 4.500.000,00 | | | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 100.00 | #VALUE! | | |
| *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | | | 275,532,000.00 | 275,532,000.00 | 75.330.000,00 | | | 270,000,400.00 | 270,000,400.00 | 74,609,500.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.99 | 97.99 | #VALUE! | | |
| *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | 326,839,000.00 | 326,839,000.00 | 436,210,000.00 | | | 302,600,500.00 | 302,600,500.00 | 424,448,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92.58 | 92.58 | 97.30 | | |
| *Evaluasi Kelurahan* | | | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | - | | | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 100.00 | #DIV/0! | | |
| ***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semampir*** | - | - | 608,921,000.00 | 608,921,000.00 | 516,040,000.00 | - | - | 555,459,200.00 | 552,209,200.00 | 507,831,600.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91.22 | 90.69 | 98.41 | | |
| *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan* | | | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | - | | | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 100.00 | #DIV/0! | | |
| *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | | | 253,065,600.00 | 253,065,600.00 | 200,000,000.00 | | | 245,288,400.00 | 245,288,400.00 | 199,166,900.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96.93 | 96.93 | 99.58 | | |
| *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | 346,005,400.00 | 346,005,400.00 | 316,040,000.00 | | | 300,670,800.00 | 300,670,800.00 | 308,664,700.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86.90 | 86.90 | 97.67 | | |
| *Evaluasi Kelurahan* | | | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | - | | | 3,250,000.00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.28 | 0.00 | #DIV/0! | | |
| ***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kraksaan Wetan*** | - | - | 608,921,000.00 | 608,921,000.00 | 516,040,000.00 | - | - | 565,411,500.00 | 564,661,500.00 | 500,754,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92.85 | 92.73 | 97.04 | | |
| *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan* | | | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 4,475,000.00 | | | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 3,475,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 100.00 | 77.65 | | |
| *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | | | 274,590,000.00 | 274,590,000.00 | 95,000,000.00 | | | 260,924,000.00 | 260,924,000.00 | 94,000,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.02 | 95.02 | 98.95 | | |
| *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | 330,581,000.00 | 330,581,000.00 | 416,565,000.00 | | | 300,787,500.00 | 300,787,500.00 | 403,279,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.99 | 90.99 | 96.81 | | |
| *Evaluasi Kelurahan* | | | 800,000.00 | 800,000.00 | | | | 750,000.00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.75 | 0.00 | #DIV/0! | | |
| ***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kandangjati Kulon*** | - | - | 608,921,000.00 | 608,921,000.00 | 516,040,000.00 | - | - | 586,651,000.00 | 586,251,000.00 | 509,834,700.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96.34 | 96.28 | 98.80 | | |
| *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan* | | | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 4,475,000.00 | | | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 3,475,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 66.10 | 66.10 | 77.65 | | |
| *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan* | | | 303,043,000.00 | 303,043,000.00 | 99,039,000.00 | | | 290,140,000.00 | 290,140,000.00 | 98,350,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.74 | 95.74 | 99.30 | | |
| *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | 302,528,000.00 | 302,528,000.00 | 412,526,000.00 | | | 294,161,000.00 | 294,161,000.00 | 408,009,700.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.23 | 97.23 | 98.91 | | |
| *Evaluasi Kelurahan* | | | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 0.00 | #DIV/0! | | |
| **Jumlah** | **-** | **-** | **6,718,397,496.00** | **10,017,307,598.00** | **10,005,027,038.00** | **-** | **-** | **6,387,071,542.00** | **8,950,206,966.00** | **9,392,188,772.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **95.07** | **89.35** | **93.87** | | |

### 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah kecamatan Kraksaan :

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kraksaan

### A. Permasalahan Kecamatan Kraksaan

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan :

- **Keterbatasan Sumber Daya** : Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur** : Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.

- **Birokrasi yang Kaku** : Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.
- **Akses dan Kesenjangan Digital** : Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah** : Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital** : Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar-Sektor** : Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur** : Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu** : Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat** : Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal.
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal.
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi.
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal.
5. Kualitas sumber daya manusia masih tergolong rendah.

**B. Isu Strategis Kecamatan Kraksaan**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Kraksaan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

**Tabel 2.1**

**Isu Strategis Kecamatan Kraksaan**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi seperti kawasan Pantai, dataran rendah | Belum optimalnya penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal untuk kesejahteraan dan konservasi | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| potensi sumber daya alam, seperti sektor Perikanan, pertanian, perkebunan, Pariwisata berbasis alam, | Masih tingginya angka kemiskinan dan ketergantungan | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kraksaan Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kraksaan, dalam hal ini Kecamatan Kraksaan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.2 berikut ini :

Gambar 3.2.1

Konsep Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

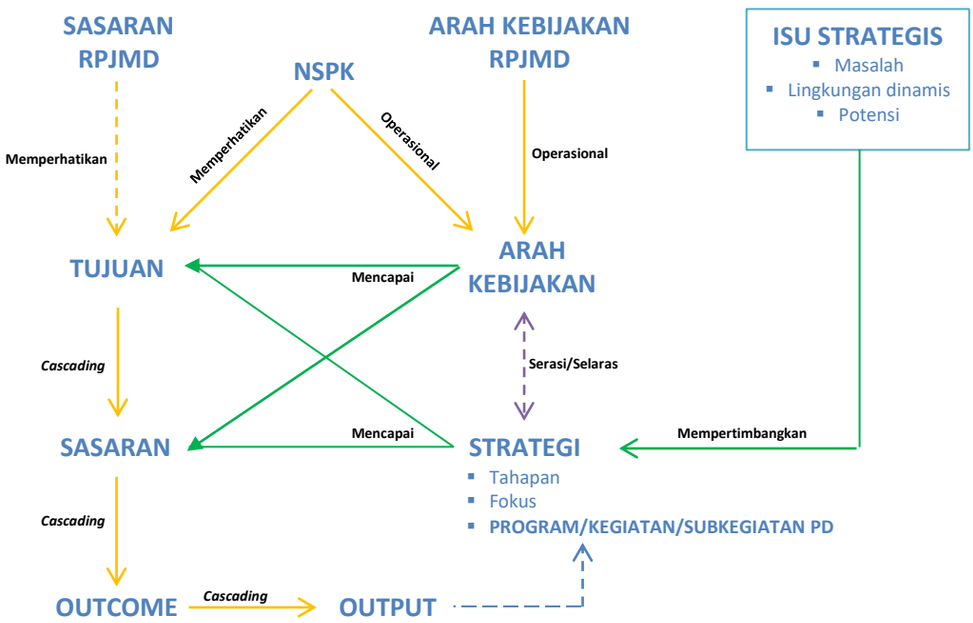


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

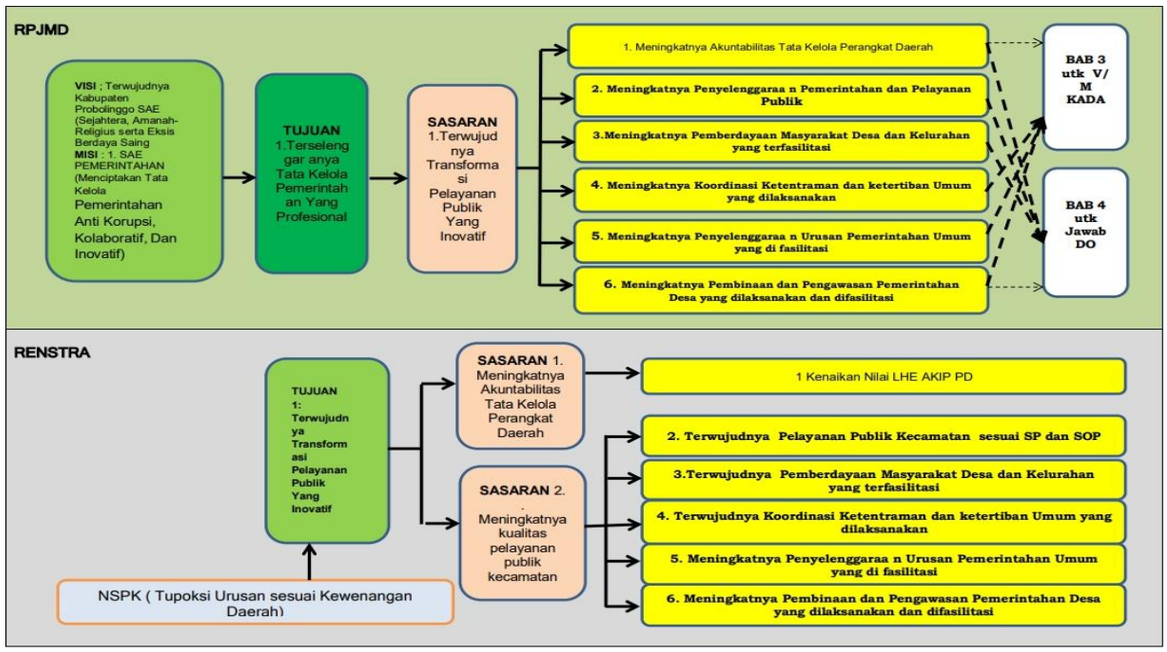


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kraksaan

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kraksaan** | | | | | | | | | | | |
| Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif (SAE Pemerintahan) | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 87,5 | 88,38 | 89,26 | 90,15 | 91,05 | 91,96 | 92,88 | |

Keterangan : SIPD

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam **Perencanaan Pembangunan Daerah**. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan **Visi**, diperlukan **Misi**, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam **Strategi Pembangunan**, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam **Arah Kebijakan**, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan,

pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3.3**

**(Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kraksaan Tahun 2025-2029)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VISI : **TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO SAE, SEJAHTERA, AMANAH RELIGIUS SERTA EXSIS BERDAYA SAING** | | | | |
| MISI 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif **(SAE PEMERINTAHAN)** | | | | |
| **TUJUAN / INDIKATOR** | **SASARAN / INDIKATOR** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif<br><br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah<br>Indikator :<br>Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah<br>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan | Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan` | 1 | Penguatan Sistem Perencanaan dan pengukuran Kinerja |
| | | | 2 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan |
| | | | 3 | Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| | | | 4 | Transparansi dan Pelibatan Publik |
| | | | 5 | Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan kecamatan | 1 | Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik |
| | | | 2 | Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi |
| | | | 3 | Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting |
| | | | 4 | Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran |
| | | Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat di kecamatan | 1 | Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses |
| | | | 2 | Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan |
| | | | 3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan |
| | | | 4 | Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik |
| | | | 5 | Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas |

## 3.3 Strategi dan Penahapan serta Definisi Operasional Kecamatan Kraksaan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Kraksaan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

### B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Kraksaan

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Kraksaan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5**

**Penahapan Renstra Kecamatan Kraksaan**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

### C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kraksaan

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

**Tabel 3.1.2**

**Definisi Operasional IKU Kecamatan Kraksaan**

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut :<br>$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan | Pelayanan Publik yang | Jumlah Pelayanan Publik yang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Publik di Kecamatan | berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| 3. | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai hasil atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1) ——————————— X 100<br>Nilai LHE AKIP tahun (n-1)<br>Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

**D. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Kraksaan**

Penyajian Lokus (Lokasi Fokus) dalam Renstra Kecamatan Kraksaan sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Kraksaan :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Kraksaan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Kraksaan, sebagai berikut

**Tabel 3.5**

**Arah Kebijakan Kecamatan Kraksaan**

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1<br><br><br><br><br><br>2 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN ) | 1. Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik<br>2. Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahun, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman,

ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

# Tabel 4.1

## Program Kecamatan Kraksaan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 – KECAMATAN KRAKSAAN | | | | | 8.016.300.000,00 | | 8.521.500.000,00 | | 8.521.500.000,00 | | 8.521.700.000,00 | | 8.521.700.000,00 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 5.843.000.000,00 | | 6.348.200.000,00 | | 6.348.200.000,00 | | 6.348.400.000,00 | | 6.348.400.000,00 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 71.71 | 71.75 | 71.80 | 5.843.000.000,00 | 71.85 | 6.348.200.000,00 | 71.90 | 6.348.200.000,00 | 71.95 | 6.348.400.000,00 | 72 | 6.348.400.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 2.045.900.000,00 | | 2.045.900.000,00 | | 2.045.900.000,00 | | 2.045.900.000,00 | | 2.045.900.000,00 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | 85 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | 85 | 100 | 100 | 2.045.900.000,00 | 100 | 2.045.900.000,00 | 100 | 2.045.900.000,00 | 100 | 2.045.900.000,00 | 100 | 2.045.900.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 36.000.000,00 | | 36.000.000,00 | | 36.000.000,00 | | 36.000.000,00 | | 36.000.000,00 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | 100 | 100 | 100 | 36.000.000,00 | 100 | 36.000.000,00 | 100 | 36.000.000,00 | 100 | 36.000.000,00 | 100 | 36.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | 100 | 100 | 100 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 8.016.300.000,00 | | 8.521.500.000,00 | | 8.521.500.000,00 | | 8.521.700.000,00 | | 8.521.700.000,00 | |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan:
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
14. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;.
16. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sun Kegiatan Renstra Kecamatan Kraksaan

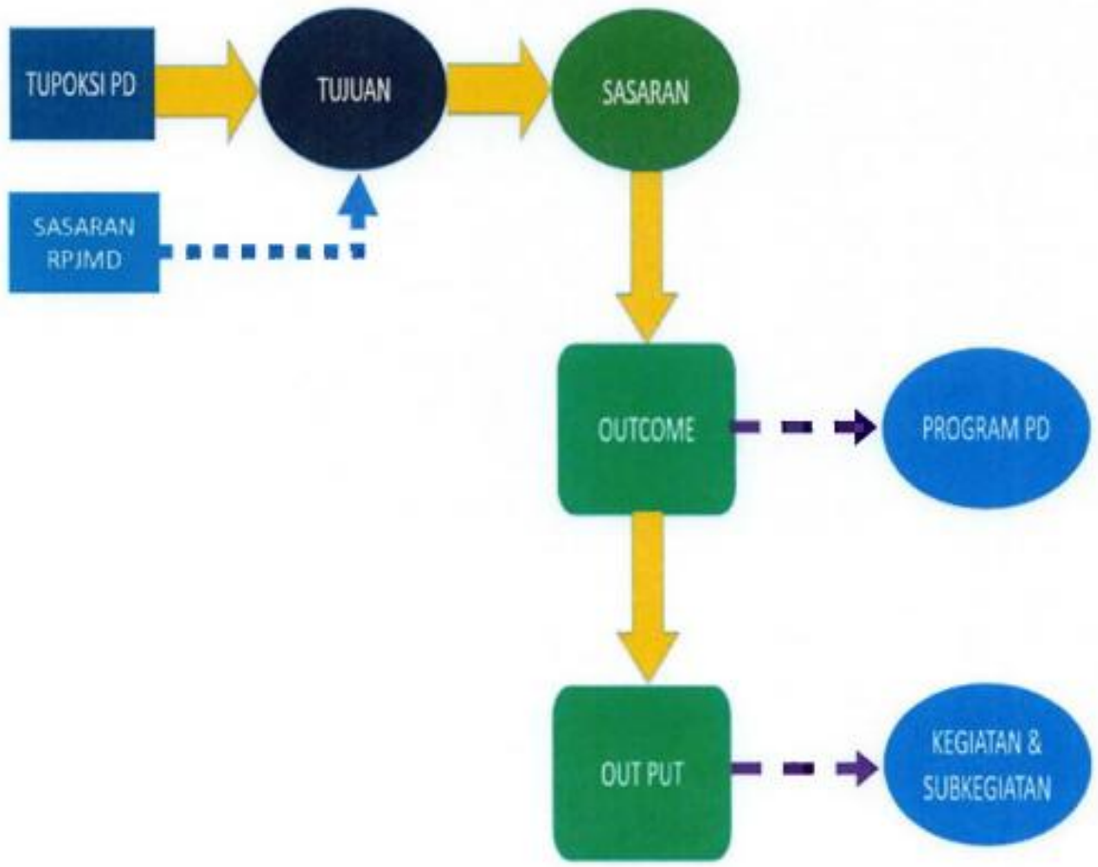

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Kraksaan

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Kraksaan** | | | | | | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah (SAE PEMERINTAHAN) | Terwujudnya Transpormasi Pelayanan Publik yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Persentase Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | Persentase Nilai LHE AKIP PD (%) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya ATK, Internet, Telepon, Air, Listrik dan Jasa Pendukung Alih Daya, Waker, Jasa Kebersihan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dan aman | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), Perijinan UMKM/OSS | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa terlaksana dengan baik | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan baik dan lancar | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan | |
| | | | | Terlaksananya peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wilayah kecamatan | | | | |
| | | | | Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban di Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |
| | | | | Terwujudnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah difasilitasi | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Terwujudnya Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |
| | | | | | | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |

*SUMBER DATA : SIPD RENTRA*

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut :

## Tabel 4.3

## Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kraksaan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.818.081.535,21 | | 2.849.399.737,91 | | 2.891.864.942,84 | | 2.950.871.936,51 | | 3.020.066.643,59 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.624.188.435,21 | | 2.653.351.844,54 | | 2.692.895.306,43 | | 2.747.842.428,6 | | 2.812.276.316,61 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 70,31 | 70,38 | 2.624.188.435,21 | 70,42 | 2.653.351.844,54 | 70,45 | 2.692.895.306,43 | 70,49 | 2.747.842.428,6 | 70,52 | 2.812.276.316,61 | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 8.700.000 | | 8.900.000 | | 9.100.000 | | 9.210.000 | | 9.400.000 | |
| Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 8.700.000 | 2 | 8.900.000 | 2 | 9.100.000 | 2 | 9.210.000 | 2 | 9.400.000 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3.000.000 | | 3.100.000 | | 3.200.000 | | 3.300.000 | | 3.400.000 | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.100.000 | 2 | 3.200.000 | 2 | 3.300.000 | 2 | 3.400.000 | |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 2.850.000 | | 2.900.000 | | 2.950.000 | | 2.955.000 | | 3.000.000 | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 2.850.000 | 2 | 2.900.000 | 2 | 2.950.000 | 2 | 2.955.000 | 2 | 3.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | 2.850.000 | | 2.900.000 | | 2.950.000 | | 2.955.000 | | 3.000.000 | |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 2.850.000 | 2 | 2.900.000 | 2 | 2.950.000 | 2 | 2.955.000 | 2 | 3.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.052.150.649,21 | | 2.070.170.058,54 | | 2.115.678.520,43 | | 2.190.325.642,6 | | 2.252.209.530,61 | |
| Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 11 | 11 | 2.052.150.649,21 | 11 | 2.070.170.058,54 | 11 | 2.115.678.520,43 | 11 | 2.190.325.642,6 | 11 | 2.252.209.530,61 | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1.200.000 | 1.300.000 | | 1.350.000 | | 1.400.000 | | 1.500.000 | | 1.550.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1.200.000 | 1.300.000 | | 1.350.000 | | 1.400.000 | | 1.450.000 | | 1.500.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.049.550.649,21 | | 2.067.470.058,54 | | 2.112.828.520,43 | | 2.187.375.642,6 | | 2.249.159.530,61 | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 11 | 11 | 2.049.550.649,21 | 11 | 2.067.470.058,54 | 11 | 2.112.828.520,43 | 11 | 2.187.375.642,6 | 11 | 2.249.159.530,61 | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.300.000 | | 1.350.000 | | 1.400.000 | | 1.450.000 | | 1.500.000 | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1.300.000 | | 1.350.000 | | 1.450.000 | | 1.500.000 | | 1.550.000 | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | |
| 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 39.400.000 | | 39.950.000 | | 40.455.000 | | 41.000.000 | | 41.600.000 | |
| Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 1 | 39.400.000 | 1 | 39.950.000 | 1 | 40.455.000 | 1 | 41.000.000 | 1 | 41.600.000 | |
| | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 30.500.000 | | 31.000.000 | | 31.500.000 | | 32.000.000 | | 32.500.000 | |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 1 | 30.500.000 | 1 | 31.000.000 | 1 | 31.500.000 | 1 | 32.000.000 | 1 | 32.500.000 | |
| 7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 8.900.000 | | 8.950.000 | | 8.955.000 | | 9.000.000 | | 9.100.000 | |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 2 | 2 | 8.900.000 | 2 | 8.950.000 | 2 | 8.955.000 | 2 | 9.000.000 | 2 | 9.100.000 | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 52.450.000 | | 52.695.000 | | 52.870.000 | | 31.070.000 | | 31.330.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 52.450.000 | 1 | 52.695.000 | 1 | 52.870.000 | 1 | 31.070.000 | 1 | 31.330.000 | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.750.000 | | 7.755.000 | | 7.760.000 | | 7.765.000 | | 7.770.000 | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 7.750.000 | 1 | 7.755.000 | 1 | 7.760.000 | 1 | 7.765.000 | 1 | 7.770.000 | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.400.000 | | 4.445.000 | | 4.450.000 | | 4.455.000 | | 4.460.000 | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 4.400.000 | 1 | 4.445.000 | 1 | 4.450.000 | 1 | 4.455.000 | 1 | 4.460.000 | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 24.550.000 | | 24.600.000 | | 24.650.000 | | 2.700.000 | | 2.750.000 | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 24.550.000 | 1 | 24.600.000 | 1 | 24.650.000 | 1 | 2.700.000 | 1 | 2.750.000 | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 2.750.000 | | 2.755.000 | | 2.800.000 | | 2.850.000 | | 2.900.000 | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 2.750.000 | 1 | 2.755.000 | 1 | 2.800.000 | 1 | 2.850.000 | 1 | 2.900.000 | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.700.000 | | 7.740.000 | | 7.760.000 | | 7.800.000 | | 7.850.000 | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 7.700.000 | 1 | 7.740.000 | 1 | 7.760.000 | 1 | 7.800.000 | 1 | 7.850.000 | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 5.300.000 | | 5.400.000 | | 5.450.000 | | 5.500.000 | | 5.600.000 | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 1 | 5.300.000 | 1 | 5.400.000 | 1 | 5.450.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.600.000 | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 80.200.000 | | 80.300.000 | | 80.375.000 | | 80.450.000 | | 80.550.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 5 | 80.200.000 | 5 | 80.300.000 | 5 | 80.375.000 | 5 | 80.450.000 | 5 | 80.550.000 | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 15 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 27.500.000 | | 27.550.000 | | 27.600.000 | | 27.650.000 | | 27.700.000 | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 15 | 15 | 27.500.000 | 15 | 27.550.000 | 15 | 27.600.000 | 15 | 27.650.000 | 15 | 27.700.000 | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 52.700.000 | | 52.750.000 | | 52.775.000 | | 52.800.000 | | 52.850.000 | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 5 | 52.700.000 | 5 | 52.750.000 | 5 | 52.775.000 | 5 | 52.800.000 | 5 | 52.850.000 | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 269.651.786 | | 279.536.786 | | 272.416.786 | | 273.536.786 | | 274.686.786 | |
| Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 269.651.786 | 12 | 279.536.786 | 12 | 272.416.786 | 12 | 273.536.786 | 12 | 274.686.786 | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.765.000 | | 37.700.000 | | 3.780.000 | | 3.800.000 | | 3.850.000 | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 2 | 2 | 3.765.000 | 2 | 37.700.000 | 2 | 3.780.000 | 2 | 3.800.000 | 2 | 3.850.000 | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 22.100.000 | | 22.200.000 | | 22.300.000 | | 22.350.000 | | 22.400.000 | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 22.100.000 | 12 | 22.200.000 | 12 | 22.300.000 | 12 | 22.350.000 | 12 | 22.400.000 | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 28.000.000 | | 2.850.000 | | 28.550.000 | | 28.600.000 | | 28.650.000 | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | 4 | 28.000.000 | 4 | 2.850.000 | 4 | 28.550.000 | 4 | 28.600.000 | 4 | 28.650.000 | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 215.786.786 | | 216.786.786 | | 217.786.786 | | 218.786.786 | | 219.786.786 | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 6 | 6 | 215.786.786 | 6 | 216.786.786 | 6 | 217.786.786 | 6 | 218.786.786 | 6 | 219.786.786 | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 121.636.000 | | 121.800.000 | | 122.000.000 | | 122.250.000 | | 122.500.000 | |
| Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | 3 | 121.636.000 | 3 | 121.800.000 | 3 | 122.000.000 | 3 | 122.250.000 | 3 | 122.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 11 | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 47.500.000 | | 47.550.000 | | 47.600.000 | | 47.650.000 | | 47.750.000 | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 11 | 11 | 47.500.000 | 11 | 47.550.000 | 11 | 47.600.000 | 11 | 47.650.000 | 11 | 47.750.000 | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 6.500.000 | | 6.550.000 | | 6.650.000 | | 6.750.000 | | 6.850.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 8 | 8 | 6.500.000 | 8 | 6.550.000 | 8 | 6.650.000 | 8 | 6.750.000 | 8 | 6.850.000 | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 67.636.000 | | 67.700.000 | | 67.750.000 | | 67.850.000 | | 67.900.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | 3 | 67.636.000 | 3 | 67.700.000 | 3 | 67.750.000 | 3 | 67.850.000 | 3 | 67.900.000 | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 24.000.000 | | 24.266.719,35 | | 24.628.371,38 | | 25.130.900,43 | | 25.720.192,46 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 24.000.000 | 100 | 24.266.719,35 | 100 | 24.628.371,38 | 100 | 25.130.900,43 | 100 | 25.720.192,46 | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 19.500.000 | | 19.716.719,35 | | 19.978.371,38 | | 20.380.900,43 | | 20.920.192,46 | |
| Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 2 | 2 | 19.500.000 | 2 | 19.716.719,35 | 2 | 19.978.371,38 | 2 | 20.380.900,43 | 2 | 20.920.192,46 | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 19.500.000 | | 19.716.719,35 | | 19.978.371,38 | | 20.380.900,43 | | 20.920.192,46 | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 2 | 2 | 19.500.000 | 2 | 19.716.719,35 | 2 | 19.978.371,38 | 2 | 20.380.900,43 | 2 | 20.920.192,46 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | 4.500.000 | | 4.550.000 | | 4.650.000 | | 4.750.000 | | 4.800.000 | |
| Prosentase Peningkatan Pelayanan Perinjinan Non Usaha Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.550.000 | 1 | 4.650.000 | 1 | 4.750.000 | 1 | 4.800.000 | |
| 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 4.500.000 | | 4.550.000 | | 4.650.000 | | 4.750.000 | | 4.800.000 | |
| Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.550.000 | 1 | 4.650.000 | 1 | 4.750.000 | 1 | 4.800.000 | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 20.000.000 | | 20.222.266,12 | | 20.523.642,82 | | 20.942.417,03 | | 21.433.493,71 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.222.266,12 | 100 | 20.523.642,82 | 100 | 20.942.417,03 | 100 | 21.433.493,71 | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 10.000.000 | | 10.100.000 | | 10.201.000 | | 10.303.010 | | 10.406.040 | |
| Jumlah Kegiatan dan Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.100.000 | 2 | 10.201.000 | 2 | 10.303.010 | 2 | 10.406.040 | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 5.000.000 | | 5.050.000 | | 5.100.500 | | 5.151.505 | | 5.203.020 | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 6 | 6 | 5.000.000 | 6 | 5.050.000 | 6 | 5.100.500 | 6 | 5.151.505 | 6 | 5.203.020 | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 5.000.000 | | 5.050.000 | | 5.100.500 | | 5.151.505 | | 5.203.020 | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.050.000 | 2 | 5.100.500 | 2 | 5.151.505 | 2 | 5.203.020 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 10.000.000 | | 10.122.266,12 | | 10.322.642,82 | | 10.639.407,03 | | 11.027.453,71 | |
| Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 20 | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.122.266,12 | 20 | 10.322.642,82 | 20 | 10.639.407,03 | 20 | 11.027.453,71 | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 5.000.000 | | 5.050.000 | | 5.100.500 | | 5.151.505 | | 5.203.020 | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 20 | 20 | 5.000.000 | 20 | 5.050.000 | 20 | 5.100.500 | 20 | 5.151.505 | 20 | 5.203.020 | |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 5.000.000 | | 5.072.266,12 | | 5.222.142,82 | | 5.487.902,03 | | 5.824.433,71 | |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 20 | 20 | 5.000.000 | 20 | 5.072.266,12 | 20 | 5.222.142,82 | 20 | 5.487.902,03 | 20 | 5.824.433,71 | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 25.893.100 | | 26.180.857,95 | | 26.571.036,79 | | 27.113.204,92 | | 27.748.979,8 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 25.893.100 | 100 | 26.180.857,95 | 100 | 26.571.036,79 | 100 | 27.113.204,92 | 100 | 27.748.979,8 | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 21.393.100 | | 21.580.857,95 | | 21.871.036,79 | | 22.313.204,92 | | 22.848.979,8 | |
| Jumlah Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1 | 21.393.100 | 1 | 21.580.857,95 | 1 | 21.871.036,79 | 1 | 22.313.204,92 | 1 | 22.848.979,8 | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 6.500.000 | 6.700.000 | | 6.800.000 | | 6.850.000 | | 6.900.000 | | 6.950.000 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 14.693.100 | | 14.780.857,95 | | 15.021.036,79 | | 15.413.204,92 | | 15.898.979,8 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1 | 14.693.100 | 1 | 14.780.857,95 | 1 | 15.021.036,79 | 1 | 15.413.204,92 | 1 | 15.898.979,8 | |
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 6.700.000 | | 6.800.000 | | 6.850.000 | | 6.900.000 | | 6.950.000 | |
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 6.500.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.850.000 | 6.850.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.950.000 | 6.950.000 | |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 4.500.000 | | 4.600.000 | | 4.700.000 | | 4.800.000 | | 4.900.000 | |
| Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | |
| 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | 4.500.000 | | 4.600.000 | | 4.700.000 | | 4.800.000 | | 4.900.000 | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 104.000.000 | | 105.155.783,83 | | 106.722.942,6 | | 108.900.568,5 | | 111.454.167,3 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 104.000.000 | 100 | 105.155.783,83 | 100 | 106.722.942,6 | 100 | 108.900.568,5 | 100 | 111.454.167,3 | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 104.000.000 | | 105.155.783,83 | | 106.722.942,6 | | 108.900.568,5 | | 111.454.167,3 | |
| Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 104.000.000 | 2 | 105.155.783,83 | 2 | 106.722.942,6 | 2 | 108.900.568,5 | 2 | 111.454.167,3 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 300 | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 95.500.000 | | 96.555.783,83 | | 98.022.942,6 | | 100.100.568,5 | | 102.554.167,3 | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 300 | 300 | 95.500.000 | 300 | 96.555.783,83 | 300 | 98.022.942,6 | 300 | 100.100.568,5 | 300 | 102.554.167,3 | |
| 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 8.500.000 | | 8.600.000 | | 8.700.000 | | 8.800.000 | | 8.900.000 | |
| Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 8.500.000 | 2 | 8.600.000 | 2 | 8.700.000 | 2 | 8.800.000 | 2 | 8.900.000 | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 20.000.000 | | 20.222.266,12 | | 20.523.642,82 | | 20.942.417,03 | | 21.433.493,71 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.222.266,12 | 100 | 20.523.642,82 | 100 | 20.942.417,03 | 100 | 21.433.493,71 | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 20.000.000 | | 20.222.266,12 | | 20.523.642,82 | | 20.942.417,03 | | 21.433.493,71 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pengawasn Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2.000.000 | 2.200.000 | 20.000.000 | 2.300.000 | 20.222.266,12 | 2.400.000 | 20.523.642,82 | 2.500.000 | 20.942.417,03 | 2.600.000 | 21.433.493,71 | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | 6.200.000 | | 6.300.000 | | 6.400.000 | | 6.500.000 | | 6.600.000 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 4 | 4 | 6.200.000 | 4 | 6.300.000 | 4 | 6.400.000 | 4 | 6.500.000 | 4 | 6.600.000 | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 2.200.000 | | 2.300.000 | | 2.400.000 | | 2.500.000 | | 2.600.000 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 2.200.000 | | 2.300.000 | | 2.400.000 | | 2.500.000 | | 2.600.000 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 4 | 4 | 2.200.000 | 4 | 2.300.000 | 4 | 2.400.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.600.000 | |
| 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 9.400.000 | | 9.322.266,12 | | 9.323.642,82 | | 9.442.417,03 | | 9.633.493,71 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 9.400.000 | 2 | 9.322.266,12 | 2 | 9.323.642,82 | 2 | 9.442.417,03 | 2 | 9.633.493,71 | |

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Isu Strategis, Sasaran Utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan Daerah. Kecamatan tidak terdapat Program Prioritas dikarenakan Kecamatan sebagai fasilitator dari Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam mendukung terlaksananya Program Prioritas tersebut.

**Tabel 4.4**
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**
**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Kraksaan** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kraksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kraksaan**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kraksaan | | | | | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 84,54 | 85,50 | 86,25 | 87,00 | 87,50 | 89,00 | 90,00 | |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 87,5 | 88,38 | 89,26 | 90,15 | 91,05 | 91,96 | 92,88 | |
| 3. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kraksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kraksaan**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1. | 7.01 - KECAMATAN | | | | | | | | | | |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Positif | Indeks | 87,5 | 88,38 | 89,26 | 90,15 | 91,05 | 91,96 | 92,88 | |

# BAB V

# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Kraksaan.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Kraksaan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Kraksaan,  September 2025

**CAMAT KRAKSAAN**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**PUJA KURNIAWAN, S.STP., M.Si.**
Pembina Tingkat 1
NIP. 19820223 200112 1 003

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

# KECAMATAN KRUCIL TAHUN 2025-2029

KECAMATAN KRUCIL

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krucil Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Krucil Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Krucil. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Krucil. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Krucil dengan Kecamatan dan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, September 2025

**CAMAT KRUCIL**

KABUPATEN PROBOLINGGO

**FEBRYA ILHAM HIDAYAT, ST, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690208 200312 1 005

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I ..... 1
PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4
1.4 Sistematika Penulisan ..... 5
BAB II ..... 7
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 7
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Krucil ..... 7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Krucil ..... 7
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Krucil ..... 13
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Krucil ..... 22
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 28
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Krucil ..... 28
2.2.1 Permasalahan Kecamatan Krucil ..... 28
2.2.1 Isu Strategis Kecamatan Krucil ..... 28
BAB III ..... 32
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 32
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 32
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 33
3.3 Strategi Kecamatan Krucil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 36
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Krucil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 37
BAB IV ..... 39
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 39
4.1 Uraian Program ..... 39
4.2 Uraian Kegiatan ..... 43
BAB V ..... 61
PENUTUP ..... 61

## DAFTAR TABEL


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tabel | 2.1.2.1 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan | ..... | 13 |
| Tabel | 2.1.2.2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan | ..... | 14 |
| Tabel | 2.1.2.3 | Jumlah Sarana Prasarana | ..... | 14 |
| Tabel | 2.1.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo (2020-2024) | ..... | 24 |
| Tabel | 2.2 | Isu Strategis Kecamatan Krucil | ..... | 30 |
| Tabel | 3.2.1 | Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Krucil | ..... | 34 |
| Tabel | 3.2.2 | Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Krucil Tahun 2025-2029 | ..... | 35 |
| Tabel | 3.4 | Penahapan Renstra Kecamatan Krucil | ..... | 37 |
| Tabel | 4.1 | Program Kecamatan Krucil | ..... | 41 |
| Tabel | 4.2 | Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krucil | ..... | 44 |
| Tabel | 4.3 | Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Krucil | ..... | 49 |
| Tabel | 4.4 | Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah | ..... | 59 |
| Tabel | 4.5 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Krucil | ..... | 59 |
| Tabel | 4.6 | Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Krucil | ..... | 60 |

## DAFTAR GAMBAR


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gambar | 2.1 | Struktur Organisasi Kecamatan Krucil | ..... | 12 |
| Gambar | 3.1 | Konsep Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo | ..... | 33 |
| Gambar | 3.2 | Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD | ..... | 34 |
| Gambar | 4.1 | Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sun Kegiatan Renstra Kecamatan Krucil | ..... | 44 |

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Krucil menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krucil setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Krucil juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Krucil. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Krucil berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Krucil terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krucil yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Krucil untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Krucil berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Krucil dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Krucil disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Krucil akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Krucil dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Krucil untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Krucil berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan dan pembangunan keuangan daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025–2045;

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029;
20. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta pembangunan wilayah melalui perencanaan yang sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KRUCIL**

1. Subbab Gambaran Pelayanan Kecamatan Krucil paling sedikit memuat:
   a. Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Krucil;
   b. Sumber daya Kecamatan Krucil;
   c. Kinerja pelayanan Kecamatan Krucil (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
   d. Kelompok sasaran layanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Krucil paling sedikit memuat:
   a. Permasalahan pelayanan Kecamatan Krucil; dan
   b. Isu strategis.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra Kecamatan Krucil Tahun 2025 – 2029;
2. Sasaran Renstra Kecamatan Krucil Tahun 2025 – 2029;
3. Strategi Kecamatan Krucil dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Krucil Tahun 2025 – 2029; dan
4. Arah kebijakan Kecamatan Krucil dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Krucil Tahun 2025 – 2029.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Krucil 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Krucil; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Krucil

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat Kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat Kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Krucil

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Krucil Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut:

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat Kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat Kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
   b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
   c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
   d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
   e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
   f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
   g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
   h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan

terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi:
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi Kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
   e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah Kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
   f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan,

kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Krucil

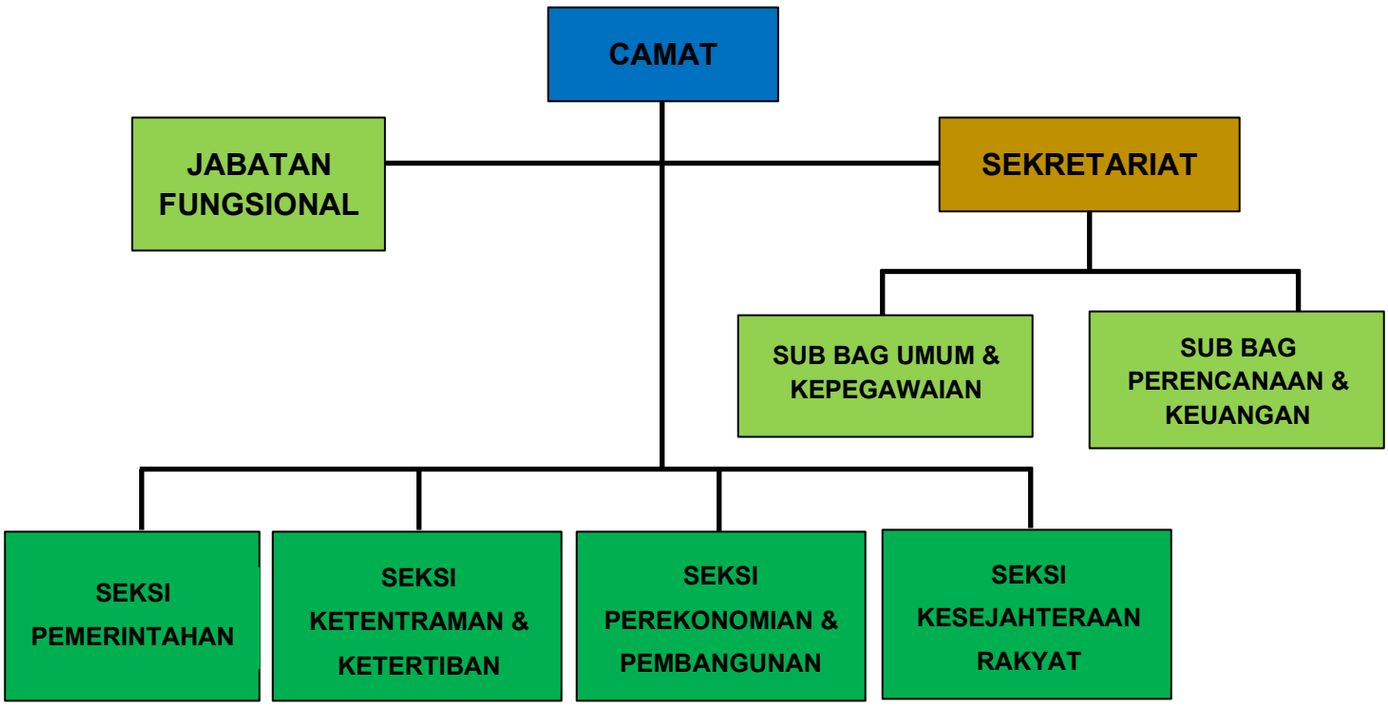

Struktur Organisasi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Krucil

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Krucil.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Krucil sebanyak 20 orang dengan rincian : Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1 orang Laki-laki. Jumlah Pegawai Non ASN sebanyak 7 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Krucil berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **1** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | **3** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **1** |

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 10. | Non ASN | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | **7** |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **6** | **0** | **11** | **3** | **16** | **4** | **20** |

*Sumber Data:* ***SIAP Online*** *Kecamatan Krucil (Data Per 17 September 2025)*

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jumlah | Eselon | | | Non ASN | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | **16** | 1 | 3 | 7 | 5 | **16** |
| 2. | Perempuan | - | - | 2 | - | - | 2 | **4** | 1 | 1 | 0 | 2 | **4** |
| **Jumlah** | | **-** | **6** | **5** | **1** | **1** | **7** | **20** | **2** | **4** | **7** | **7** | **20** |

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.2.3
Jumlah Sarana Prasarana

| No | Nama Barang | Jumlah aset yang dimiliki (Rp) | | Keterangan | Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp) | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Rp. | | Unit | Rp. | |
| 1 | Lain-lain Tanah Bangunan Perumahan/Gedung | 1,00 | 16.221.233,00 | Hibah | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 2 | Tempat Tinggal | 1,00 | 60.682.633,67 | Hibah | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 3 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,00 | 13.272.000,00 | Hibah | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 4 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 1,00 | 158.000.000,00 | Hibah | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 5 | Tanah Usaha | 1,00 | 17.380.000,00 | Hibah | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 6 | Tanah Lapangan Bola Volly | 1,00 | 5.000.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 5.000.000,00 | Rusak Berat |
| 7 | Portable Generating Set | 1,00 | 71.000.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 71.000.000,00 | Rusak Berat |
| 8 | Station Wagon | 1,00 | 275.700.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 0,00 | Baik |

| No | Nama Barang | Jumlah aset yang dimiliki (Rp) | | Keterangan | Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp) | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Rp. | | Unit | Rp. | |
| 9 | Sport Utility Vehicle (SUV) | 1,00 | 11.275.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 0,00 | Rusak Ringan |
| 10 | Sepeda Motor | 1,00 | 13.777.500,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 0,00 | Rusak Ringan |
| 11 | Sepeda Motor | 1,00 | 13.600.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 0,00 | Rusak Ringan |
| 12 | Sepeda Motor | 1,00 | 13.700.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 0,00 | Rusak Ringan |
| 13 | Sepeda Motor | 1,00 | 14.300.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 0,00 | Rusak Ringan |
| 14 | Sepeda Motor | 1,00 | 15.000.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 0,00 | Rusak Ringan |
| 15 | Sepeda Motor | 1,00 | 15.104.500,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 0,00 | Rusak Ringan |
| 16 | Sepeda Motor | 1,00 | 25.300.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 0,00 | Rusak Ringan |
| 17 | Lemari Besi/Metal | 1,00 | 3.200.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 3.200.000,00 | Rusak Ringan |
| 18 | Lemari Kayu | 1,00 | 2.000.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 2.000.000,00 | Rusak Ringan |
| 19 | Lemari Kayu | 1,00 | 4.350.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 4.350.000,00 | Rusak Ringan |
| 20 | Lemari Kayu | 1,00 | 4.350.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 4.350.000,00 | Rusak Ringan |
| 21 | Lemari Kayu | 1,00 | 2.925.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 2.925.000,00 | Rusak Ringan |
| 22 | Lemari Kayu | 1,00 | 2.925.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 2.925.000,00 | Rusak Ringan |
| 23 | Lemari Kayu | 1,00 | 5.000.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 5.000.000,00 | Rusak Ringan |
| 24 | Filing Cabinet Besi | 1,00 | 3.000.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 25 | Filing Cabinet Besi | 1,00 | 2.600.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 26 | Filing Cabinet Besi | 1,00 | 2.600.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 27 | Filing Cabinet Besi | 1,00 | 2.600.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 28 | Filing Cabinet Besi | 1,00 | 2.600.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 29 | Brandkas | 1,00 | 4.920.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 30 | CCTV - Camera Control Television System | 1,00 | 6.950.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 31 | CCTV - Camera Control Television System | 1,00 | 2.340.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 32 | Mesin Absensi | 1,00 | 10.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 10.000.000,00 | Rusak Berat |

| No | Nama Barang | Jumlah aset yang dimiliki (Rp) | | Keterangan | Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp) | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Rp. | | Unit | Rp. | |
| 33 | Mesin Absensi | 1,00 | 18.476.700,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 34 | Brand Kas | 1,00 | 6.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 35 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 178.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 178.000,00 | Rusak Berat |
| 36 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 178.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 178.000,00 | Rusak Berat |
| 37 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 1.190.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 1.190.000,00 | Rusak Berat |
| 38 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 1.190.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 1.190.000,00 | Rusak Berat |
| 39 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 1.190.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 1.190.000,00 | Rusak Berat |
| 40 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 1.400.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 1.400.000,00 | Rusak Berat |
| 41 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 1.400.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 1.400.000,00 | Rusak Berat |
| 42 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 2.850.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 43 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 2.850.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 44 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 2.850.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 45 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 2.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 46 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 2.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 47 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 3.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 48 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 3.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 49 | Meja Kerja Kayu | 1,00 | 6.200.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 50 | Kursi Besi/Metal | 1,00 | 2.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 51 | Kursi Besi/Metal | 1,00 | 2.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 52 | Meja Rapat | 1,00 | 2.641.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 53 | Meja Rapat | 1,00 | 2.641.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 54 | Meja Rapat | 1,00 | 2.641.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 55 | Meja Rapat | 1,00 | 3.800.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 56 | Meja Rapat | 1,00 | 4.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 57 | Meja Resepsionis | 1,00 | 7.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 58 | Meja 1/2 Biro | 1,00 | 2.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 59 | Meja 1/2 Biro | 1,00 | 2.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 60 | Kursi Rapat | 1,00 | 2.185.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 61 | Kursi Rapat | 1,00 | 2.185.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 62 | Kursi Tamu | 1,00 | 1.415.018,75 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 63 | Kursi Tamu | 1,00 | 2.950.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 64 | Kursi Tamu | 1,00 | 5.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 65 | Kursi Tamu | 1,00 | 4.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |

| No | Nama Barang | Jumlah aset yang dimiliki (Rp) | | Keterangan | Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp) | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Rp. | | Unit | Rp. | |
| 66 | Bangku Tunggu | 1,00 | 2.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 67 | Bangku Tunggu | 1,00 | 2.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 68 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0;00 | Baik |
| 69 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 70 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 71 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 72 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 73 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 74 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 75 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 76 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 77 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 78 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 79 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 80 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 81 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 82 | Kursi Lipat | 1,00 | 219.500,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 83 | Meja Komputer | 1,00 | 800.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Rusak Berat |
| 84 | Meja Komputer | 1,00 | 800.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Rusak Berat |
| 85 | Filling Besi/Metal | 1,00 | 300.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 86 | Filling Besi/Metal | 1,00 | 300.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 87 | Exhause Fan | 1,00 | 825.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 88 | Treng Air/Tandon Air | 1,00 | 8.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 89 | Televisi | 1,00 | 8.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 90 | Televisi | 1,00 | 3.730.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 91 | Televisi | 1,00 | 3.560.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 92 | Sound System | 1,00 | 1.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 93 | Sound System | 1,00 | 1.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 94 | Sound System | 1,00 | 3.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 95 | Wireless | 1,00 | 6.250.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 96 | Tiang Bendera | 1,00 | 400.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 97 | Tiang Bendera | 1,00 | 400.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 98 | Tangga Aluminium | 1,00 | 920.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 99 | Mimbar/Podium | 1,00 | 2.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 100 | Gordyin/Kray | 1,00 | 6.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 101 | Gordyin/Kray | 1,00 | 470.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 102 | Gordyin/Kray | 1,00 | 470.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 103 | Gordyin/Kray | 1,00 | 470.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 104 | Gordyin/Kray | 1,00 | 470.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |

| No | Nama Barang | Jumlah aset yang dimiliki (Rp) | | Keterangan | Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp) | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Rp. | | Unit | Rp. | |
| 105 | Gordyin/Kray | 1,00 | 470.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 106 | Gordyin/Kray | 1,00 | 470.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 107 | Gordyin/Kray | 1,00 | 470.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 108 | Gordyin/Kray | 1,00 | 470.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 109 | Gordyin/Kray | 1,00 | 470.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 110 | Gordyin/Kray | 1,00 | 470.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 111 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 202.500,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 202.500,00 | Rusak Berat |
| 112 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 202.500,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 202.500,00 | Rusak Berat |
| 113 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 202.500,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 202.500,00 | Rusak Berat |
| 114 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 202.500,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 202.500,00 | Rusak Berat |
| 115 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 202.500,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 202.500,00 | Rusak Berat |
| 116 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 202.500,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 202.500,00 | Rusak Berat |
| 117 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 202.500,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 202.500,00 | Rusak Berat |
| 118 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 202.500,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 202.500,00 | Rusak Berat |
| 119 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 900.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 900.000,00 | Rusak Berat |
| 120 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 4.500.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 4.500.000,00 | Rusak Berat |
| 121 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 4.300.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 4.300.000,00 | Rusak Berat |
| 122 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 4.250.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 4.250.000,00 | Rusak Berat |
| 123 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 6.000.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 6.000.000,00 | Rusak Berat |
| 124 | Handtruck Troly Plastics | 1,00 | 250.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 250.000,00 | Rusak Berat |
| 125 | Alat Pembantu Kebakaran | 1,00 | 350.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 350.000,00 | Baik |
| 126 | Alat Pembantu Kebakaran | 1,00 | 350.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 350.000,00 | Baik |
| 127 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1,00 | 2.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 128 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1,00 | 2.400.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 129 | Kursi Kerja | 1,00 | 450.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 130 | Kursi Kerja | 1,00 | 450.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |

| No | Nama Barang | Jumlah aset yang dimiliki (Rp) | | Keterangan | Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp) | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Rp. | | Unit | Rp. | |
| 131 | Kursi Kerja | 1,00 | 450.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 132 | Kursi Kerja | 1,00 | 450.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 133 | Kursi Kerja | 1,00 | 450.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 134 | Kursi Kerja | 1,00 | 450.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 135 | Kursi Kerja | 1,00 | 600.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 136 | Kursi Kerja | 1,00 | 600.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 137 | Kursi Kerja | 1,00 | 700.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 138 | Kursi Kerja | 1,00 | 700.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 139 | Kursi Kerja | 1,00 | 700.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 140 | Kursi Kerja | 1,00 | 500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 141 | Kursi Kerja | 1,00 | 500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 142 | Kursi Kerja | 1,00 | 3.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 143 | Kursi Kerja | 1,00 | 3.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 144 | Kursi Kerja | 1,00 | 3.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 145 | Kursi Kerja | 1,00 | 1.900.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 146 | Kursi Kerja | 1,00 | 2.300.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 147 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1,00 | 3.200.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 3.200.000,00 | Rusak Berat |
| 148 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1,00 | 2.000.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 2.000.000,00 | Rusak Berat |
| 149 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1,00 | 3.475.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 3.475.000,00 | Rusak Berat |
| 150 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1,00 | 3.475.000,00 | Droping Perlengkapan | 1,00 | 3.475.000,00 | Rusak Berat |
| 151 | Camera Electronic | 1,00 | 1.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 1.500.000,00 | Rusak Berat |
| 152 | Camera Electronic | 1,00 | 6.150.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 6.150.000,00 | Rusak Berat |
| 153 | Layar Film/Projector | 1,00 | 4.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 4.000.000,00 | Rusak Berat |
| 154 | Layar Film/Projector | 1,00 | 13.050.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 13.050.000,00 | Baik |
| 155 | Handy Talky (HT) | 1,00 | 900.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 156 | Handy Talky (HT) | 1,00 | 900.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 157 | Facsimile | 1,00 | 975.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 975.000,00 | Rusak Berat |
| 158 | Sound System | 1,00 | 7.440.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 159 | Sound System | 1,00 | 7.440.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 160 | Unit Tranceiver VHF Portable | 1,00 | 900.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 161 | Unit Tranceiver VHF Portable | 1,00 | 900.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 162 | Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-Lain | 1,00 | 2.300.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 163 | Mini Komputer | 1,00 | 8.068.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 8.068.000,00 | Rusak Berat |

| No | Nama Barang | Jumlah aset yang dimiliki (Rp) | | Keterangan | Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp) | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Rp. | | Unit | Rp. | |
| 164 | P.C Unit | 1,00 | 9.850.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 165 | P.C Unit | 1,00 | 7.518.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 7.518.000,00 | Rusak Berat |
| 166 | P.C Unit | 1,00 | 9.900.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 167 | P.C Unit | 1,00 | 5.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 5.000.000,00 | Rusak Berat |
| 168 | P.C Unit | 1,00 | 7.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 7.000.000,00 | Rusak Berat |
| 169 | P.C Unit | 1,00 | 7.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 7.500.000,00 | Rusak Berat |
| 170 | P.C Unit | 1,00 | 7.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 7.500.000,00 | Rusak Berat |
| 171 | P.C Unit | 1,00 | 6.580.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 6.580.000,00 | Rusak Berat |
| 172 | P.C Unit | 1,00 | 6.580.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 6.580.000,00 | Rusak Berat |
| 173 | P.C Unit | 1,00 | 6.300.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 6.300.000,00 | Rusak Berat |
| 174 | P.C Unit | 1,00 | 7.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 7.000.000,00 | Rusak Berat |
| 175 | P.C Unit | 1,00 | 10.450.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 176 | P.C Unit | 1,00 | 7.100.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 7.100.000,00 | Rusak Berat |
| 177 | Lap Top | 1,00 | 4.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 4.000.000,00 | Rusak Berat |
| 178 | Lap Top | 1,00 | 11.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 179 | Lap Top | 1,00 | 8.800.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 180 | Lap Top | 1,00 | 9.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 181 | Lap Top | 1,00 | 9.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 182 | Lap Top | 1,00 | 8.900.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 183 | Lap Top | 1,00 | 8.900.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 184 | Lap Top | 1,00 | 12.490.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 185 | Lap Top | 1,00 | 7.735.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 186 | Lap Top | 1,00 | 18.743.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 187 | Lap Top | 1,00 | 8.122.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 188 | Lap Top | 1,00 | 8.122.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 189 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 1,00 | 2.170.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 190 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 950.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 191 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 1.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 192 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 4.850.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 193 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 900.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 900.000,00 | Rusak Berat |
| 194 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 900.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 195 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 900.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 196 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 1.400.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |

| No | Nama Barang | Jumlah aset yang dimiliki (Rp) | | Keterangan | Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp) | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Rp. | | Unit | Rp. | |
| 197 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 1.750.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 198 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 1.030.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 199 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 2.950.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 200 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 1.050.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 201 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 1.050.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 202 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 1.050.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 203 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 2.960.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 204 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 995.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 205 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 2.350.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 206 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 2.350.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 207 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 2.350.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 208 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 2.350.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 209 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 1,00 | 2.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 210 | External/ Portable Hardisk | 1,00 | 2.000.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 211 | External/ Portable Hardisk | 1,00 | 1.550.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 212 | Hard disk Eksternal | 1,00 | 2.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 2.500.000,00 | Rusak Berat |
| 213 | Hard disk Eksternal | 1,00 | 2.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 2.500.000,00 | Rusak Berat |
| 214 | Hard disk Eksternal | 1,00 | 2.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 2.500.000,00 | Rusak Berat |
| 215 | Hard disk Eksternal | 1,00 | 2.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 2.500.000,00 | Rusak Berat |
| 216 | Hard disk Eksternal | 1,00 | 1.950.001,00 | Belanja Modal | 1,00 | 1.950.001,00 | Rusak Berat |
| 217 | Hard disk Eksternal | 1,00 | 1.950.001,00 | Belanja Modal | 1,00 | 1.950.001,00 | Rusak Berat |
| 218 | Hard disk Eksternal | 1,00 | 1.850.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 1.850.000,00 | Rusak Berat |
| 219 | Hard disk Eksternal | 1,00 | 1.850.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 1.850.000,00 | Rusak Berat |
| 220 | Genset | 1,00 | 11.625.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 11.625.000,00 | Rusak Berat |
| 221 | Genset | 1,00 | 6.550.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 6.550.000,00 | Rusak Berat |
| 222 | Genset | 1,00 | 1.500.000,00 | Belanja Modal | 1,00 | 1.500.000,00 | Rusak Berat |
| 223 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1,00 | 746.078.169,00 | Hibah | 1,00 | 0,00 | Baik |

| No | Nama Barang | Jumlah aset yang dimiliki (Rp) | | Keterangan | Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp) | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Rp. | | Unit | Rp. | |
| 224 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1,00 | 17.788.401,00 | Hibah | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 225 | Bangunan Gedung Kantor lain-lain | 1,00 | 19.456.063,00 | Hibah | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 226 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 1,00 | 56.800.195,00 | Hibah | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 227 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 1,00 | 49.412.224,00 | Hibah | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 228 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 1,00 | 8.894.200,00 | Hibah | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 229 | Lain-lain Pagar | 1,00 | 18.600.000,00 | Hibah | 1,00 | 0,00 | Baik |
| 230 | Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil | 1,00 | 300.000,00 | Hibah | 1,00 | 0,00 | Baik |

*Sumber Data : E-BMD Kecamatan Krucil*

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Krucil

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Krucil yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Krucil telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Krucil dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing"***. Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025–2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks Kepuasan Masyarakat**.

**Tabel 2.13**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | - | - | - | 64,42 | 62,64 | 62,70 | 62,75 | 62,86 | 63,4 | 64,17 | 60,38 | 64,14 | 61,56 | 98,42% | 102,44% | 96,30% | 102,22% | 97,93% |
| 2 | Indeks Kualitas Air | - | - | - | 50,00 | 49,85 | 49,90 | 49,95 | 49,80 | 50 | 50,77 | 38,89 | 47,78 | 36,25 | 100,00% | 101,85% | 77,94% | 95,66% | 72,79% |
| 3 | Indeks Kualitas Udara | - | - | - | 83,00 | 79,13 | 79,22 | 79,31 | 79,38 | 80,18 | 80,71 | 82,82 | 83,64 | 92,88 | 96,60% | 102,00% | 104,54% | 105,46% | 117,01% |
| 4 | Indeks Kualitas Lahan | - | - | - | 54,84 | 54,11 | 54,11 | 54,12 | 54,75 | 55,38 | 56,58 | 55,79 | 56,15 | 54,82 | 100,98% | 104,56% | 103,10% | 103,75% | 1,001% |
| 5 | Persentase Pengelolaan Persampahan | | | | - | - | 10,00 | 15,00 | 23,00 | - | - | 10 | 19 | 28,90 | | | 100,00% | 126,67% | 125,65% |

Tabel 2.14

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

| URAIAN NAMA PROGRAM | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ANGGARAN | REALISASI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 4.174.243.200 | | | | - | 3.984.062.549 | | | | - | 95,44% | - | - | - | - | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 9.110.199.000 | | | | - | 8.587.044.383 | | | | - | 94,26% | - | - | - | - | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP | 253.043.000 | | | | - | 221.599.934 | | | | - | 87,57% | - | - | - | - | | |
| PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP | 1.114.355.000 | | | | - | 1.051.384.285 | | | | - | 94,35% | - | - | - | - | | |
| PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP | 253.650.000 | | | | - | 243.087.011 | | | | - | 95,84% | - | - | - | - | | |
| PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 900.295.000 | | | | - | 762.934.900 | | | | - | 84,74% | - | - | - | - | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | 13.506.297.134 | 14.298.060.956 | 15.674.985.564 | 16.591.919.408 | | 13.163.962.529 | 9.728.361.428 | 15.005.501.210 | 15.855.201.434 | - | 97,47% | 68,04% | 95,73% | 95,56% | | |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN | | | 30.000.000 | 335.000.000 | 60.000.000 | | | 12.755.430 | 331.166.600 | 58.879.250 | - | - | 42,52% | 98,86% | 98,13% | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | 555.000.000 | 1.482.750.000 | 1.092.500.000 | 505.500.000 | | 546.236.300 | 79.254.395 | 869.206.809 | 434.383.316 | - | 98,42% | 5,35% | 79,56% | 85,93% | | |

| URAIAN NAMA PROGRAM | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ANGGARAN | REALISASI |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | 846.060.000 | 425.250.000 | 210.250.000 | 304.364.700 | | 665.625.907 | 192.280.815 | 202.220.500 | 272.338.706 | - | 78,67% | 45,22% | 96,18% | 89,48% | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3) | | 22.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | | 21.922.350 | 2.503.600 | 8.445.000 | 14.660.800 | - | 99,65% | 35,77% | 84,45% | 97,74% | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | 111.500.000 | 40.000.000 | 65.000.000 | 60.000.000 | | 95.143.780 | 23.772.950 | 64.374.050 | 49.509.500 | - | 85,33% | 59,43% | 99,04% | 82,52% | | |
| PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | | | 20.500.000 | 10.000.000 | 1.175.000 | | | 1.370.000 | 9.625.000 | 400.000 | - | - | 6,68% | 96,25% | 34,04% | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | 50.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 100.000.000 | | 49.815.900 | 17.563.868 | 41.807.000 | 86.407.100 | - | 99,63% | 58,55% | 92,90% | 86,41% | | |
| PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | 40.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 35.500.000 | | 38.557.300 | 4.798.450 | 18.731.000 | 34.733.500 | - | 96,39% | 47,98% | 93,66% | 97,84% | | |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN | | 26.500.000 | 23.500.000 | 25.000.000 | 15.000.000 | | 19.242.450 | 11.122.400 | 24.506.000 | 14.266.000 | - | 72,61% | 47,33% | 98,02% | 95,11% | | |

| URAIAN NAMA PROGRAM | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ANGGARAN | REALISASI |
| LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | 1.708.892.250 | 1.771.050.000 | 3.311.140.000 | 1.957.500.000 | | 1.498.787.990 | 1.377.981.626 | 3.290.223.671 | 1.809.613.736 | - | 87,71% | 77,81% | 99,37% | 92,45% | | |
| JUMLAH | 15.805.785.201 | 16.866.249.386 | 18.138.110.959 | 20.798.875.568 | 19.645.959.113 | 14.850.113.063 | 16.099.294.508 | 11.451.764.965 | 19.865.806.844 | 18.630.393.347 | 93,95% | 95,45% | 63,14% | 95,51% | 94,83% | | |

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah kecamatan Krucil:

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Krucil

### 2.2.1 Permasalahan Kecamatan Krucil

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya:

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas sumber daya manusia masih tergolong rendah.

### 2.2.1 Isu Strategis Kecamatan Krucil

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Krucil adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

Tabel 2.2
Isu Strategis Kecamatan Krucil

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti kawasan pegunungan | Belum optimalnya penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | | Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |
| | Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal untuk kesejahteraan dan konservasi | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim | | | | |
| | | Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | |
| potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, serta kehutanan | Masih tingginya angka kemiskinan dan ketergantungan | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | |
| | Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

# BAB III

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu: ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Krucil, dalam hal ini Kecamatan Krucil diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu:

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah"***;
2. **"*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo

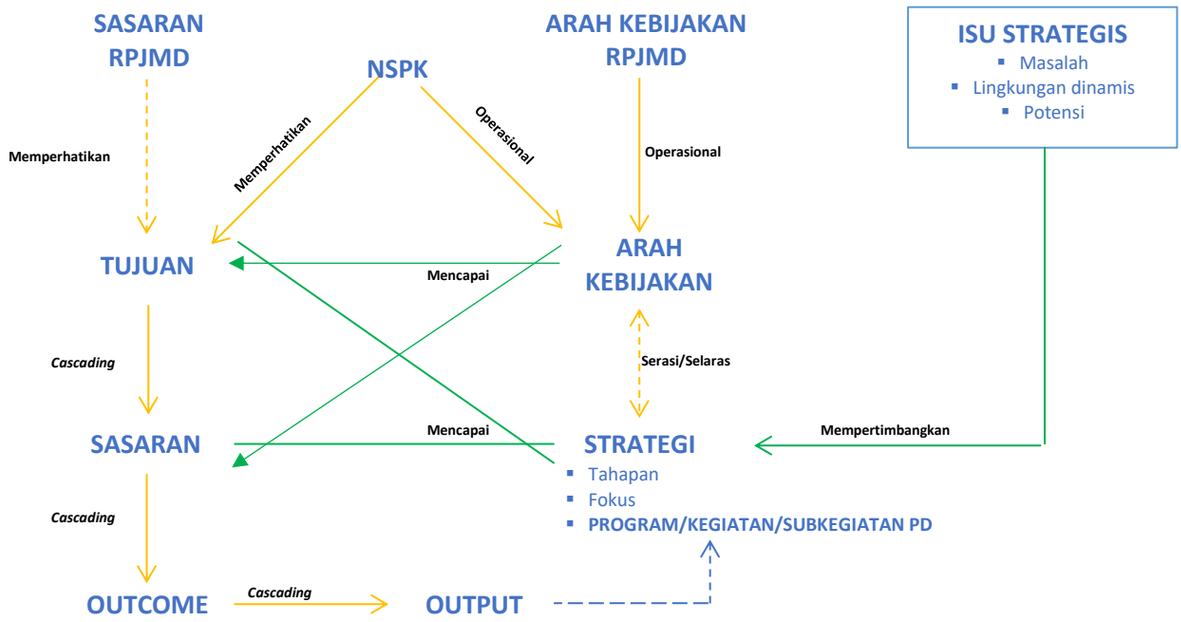


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, dan Program Prioritas. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;

2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

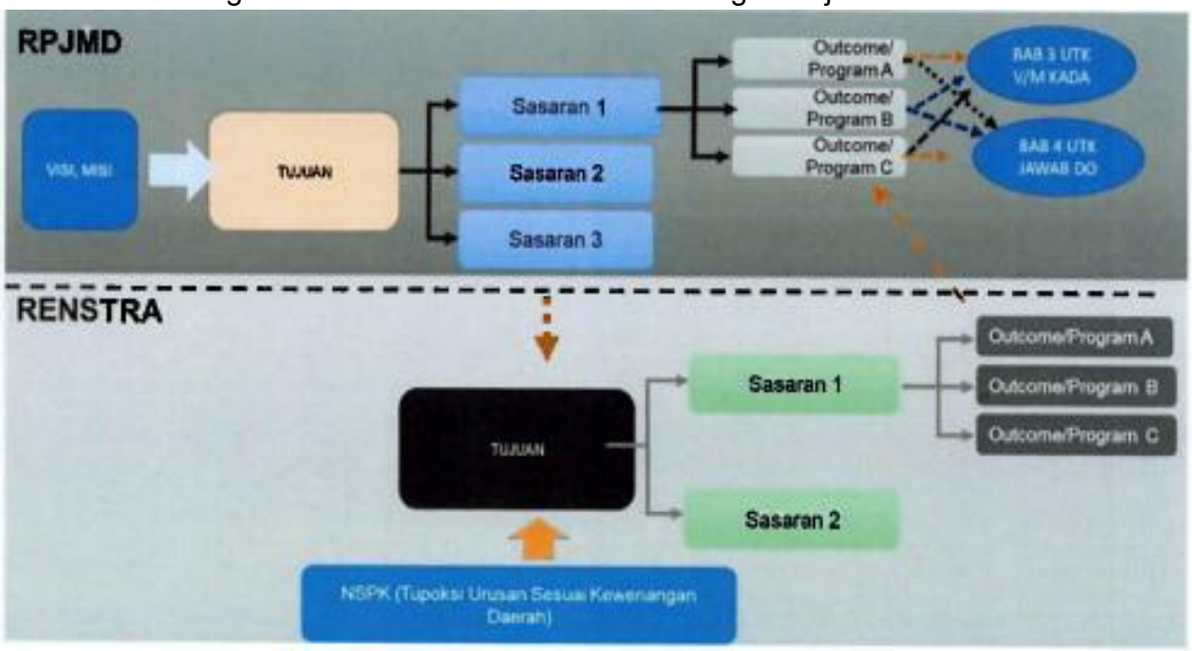


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Krucil

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASE LINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Krucil** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 71,81 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 82 | 82,82 | 83,65 | 84,48 | 85,33 | 86,18 | 87,04 | |

*Sumber Data :* ***SIPD***

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam **Perencanaan Pembangunan Daerah**. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan

Untuk mewujudkan **Visi**, diperlukan **Misi**, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam **Strategi Pembangunan**, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam **Arah Kebijakan**, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.2.2
Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Krucil Tahun 2025-2029

| | |
|---|---|
| VISI | : **TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO SAE, SEJAHTERA, AMANAH RELIGIUS SERTA EXSIS BERDAYA SAING** |
| MISI 1 | : Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif |

| TUJUAN / INDIKATOR | SASARAN/INDIKATOR | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif<br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah<br>Indikator :<br>Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah<br>2. Meningkatnya Kualitas | Peningkatan Akuntabilitas kinerja Kecamatan | 1. Penguatan Sistem Perencanaan dan pengukuran Kinerja;<br>2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan;<br>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan | | 4. Transparansi dan Pelibatan Publik;<br>5. Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten. |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kecamatan | 1. Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi;<br>3. Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Eksisting;<br>4. Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran; |
| | | Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan | 1. Pengembangan Saluran Pengaduan yang Midah diakses;<br>2. Penjaminan Tindak Lanjut pengaduan yang cepat dan Transparan;<br>3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan;<br>4. Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik<br>5. Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas. |

### 3.3 Strategi Kecamatan Krucil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena

itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian Lokus (Lokasi Fokus) dalam Renstra Kecamatan Krucil sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Krucil:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra Kecamatan Krucil dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan Krucil

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

## 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Krucil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Krucil, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Kecamatan Krucil

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Menciptakan tata kelola Pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | 1. Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul<br>2. Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfraktruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita penduduk<br>3. Memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan usaha, pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta menciptakan lapangan pekerjaan dan memberantas kemiskinan dari masyarakat rentan dengan tujuan kemandirian masyarakat sipil<br>4. Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi Masyarakat pedalaman untuk mewujudkan pedalaman ketentraman dan ketertiban umum di wilayah | 1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan;<br>2. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja;<br>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi;<br>4. Transparansi dan Pelibatan Publik;<br>5. Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten;<br>6. Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik;<br>7. Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi;<br>8. Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting;<br>9. Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran;<br>10. Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat;<br>11. Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah diakses;<br>12. Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu |
| 2. | Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata (SAE INFRASTRUKTUR) | | | |
| 3 | Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan (SAE EKONOMI) Peningkatan kemandirian Masyarakat Miskin | | | |
| 4. | Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau (SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN) | | | |
| 5. | Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas (SAE SOSIAL) | | | |

# BAB IV

# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

**a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahun, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, aparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Program Kecamatan Krucil

| BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.702.690.706,59 | | 2.732.726.535,69 | | 2.773.452.935,34 | | 2.830.043.793,85 | | 2.896.405.213,62 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.516.090.706,59 | | 2.544.052.792,77 | | 2.581.967.347,86 | | 2.634.651.042,97 | | 2.696.430.717,26 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 71,81 | 71,85 | 71,88 | 2.516.090.706,59 | 71,92 | 2.544.052.792,77 | 71,95 | 2.581.967.347,86 | 71,99 | 2.634.651.042,97 | 72,03 | 2.696.430.717,26 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 32.400.000 | | 32.760.071,12 | | 33.248.301,36 | | 33.926.715,59 | | 34.722.259,82 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 32.400.000 | 100 | 32.760.071,12 | 100 | 33.248.301,36 | 100 | 33.926.715,59 | 100 | 34.722.259,82 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 44.400.000 | | 44.893.430,79 | | 45.562.487,05 | | 46.492.165,8 | | 47.582.356,05 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 44.400.000 | 100 | 44.893.430,79 | 100 | 45.562.487,05 | 100 | 46.492.165,8 | 100 | 47.582.356,05 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 41.400.000 | | 41.860.090,87 | | 42.483.940,63 | | 43.350.803,25 | | 44.367.331,99 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 41.400.000 | 100 | 41.860.090,87 | 100 | 42.483.940,63 | 100 | 43.350.803,25 | 100 | 44.367.331,99 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 36.200.000 | | 36.602.301,68 | | 37.147.793,5 | | 37.905.774,82 | | 38.794.623,62 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 36.200.000 | 100 | 36.602.301,68 | 100 | 37.147.793,5 | 100 | 37.905.774,82 | 100 | 38.794.623,62 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 32.200.000 | | 32.557.848,46 | | 33.043.064,94 | | 33.717.291,42 | | 34.507.924,88 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 32.200.000 | 100 | 32.557.848,46 | 100 | 33.043.064,94 | 100 | 33.717.291,42 | 100 | 34.507.924,88 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | | **2.702.690.706,59** | | **2.732.726.535,69** | | **2.773.452.935,34** | | **2.830.043.793,85** | | **2.896.405.213,62** | |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
15. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sun Kegiatan Renstra Kecamatan Krucil

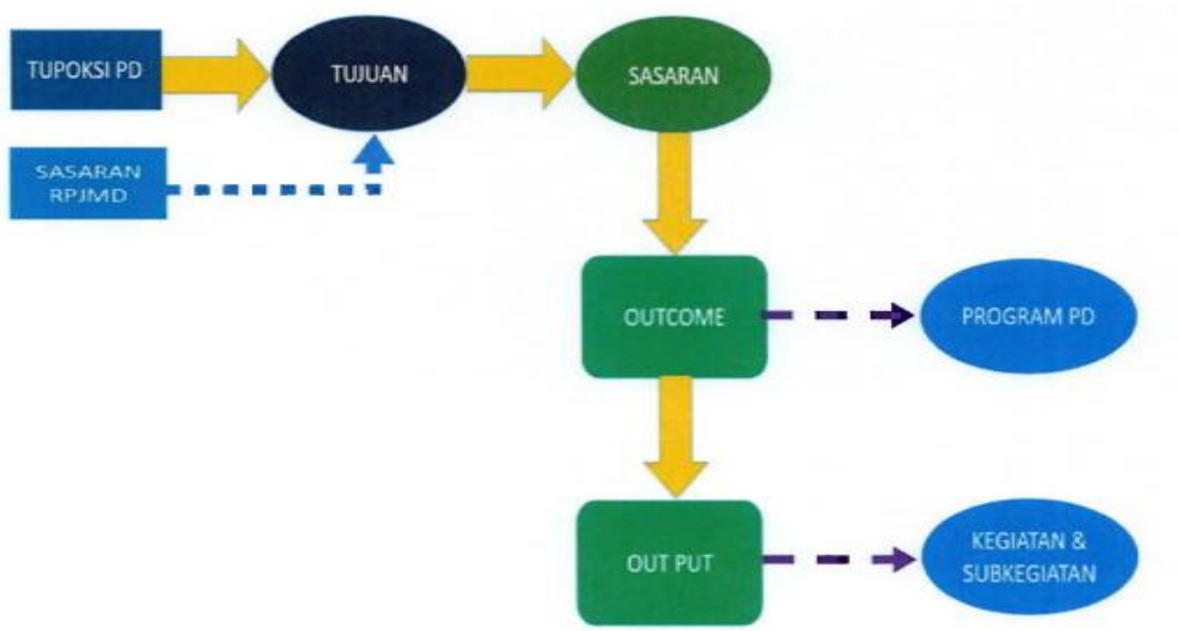


Tabel 4.2
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krucil

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten | | |
| | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP | Persentase Kenaikan LHE AKIP | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | |
| | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Meningkatnya Kinerja Layanan umum Kecamatan | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | |
| | | | | | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | |
| | | | | | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | |
| | | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | Pelayanan Perizinan Non Usaha | |
| | | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | |
| | | | | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | |
| | | | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | | **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan** | |
| | | | | | | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | |
| | | | | | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | |
| | | | | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | |
| | | | | | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai** | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | **Penugasan Kepala Daerah** | |
| | | | | | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | |
| | | | | | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | |
| | | | | | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | |

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut:

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Krucil

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.702.690.706,59 | | 2.732.726.535,69 | | 2.773.452.935,34 | | 2.830.043.793,85 | | 2.896.405.213,62 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.516.090.706,59 | | 2.544.052.792,77 | | 2.581.967.347,86 | | 2.634.651.042,97 | | 2.696.430.717,26 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 71,81 | 71,88 | 2.516.090.706,59 | 71,92 | 2.544.052.792,77 | 71,95 | 2.581.967.347,86 | 71,99 | 2.634.651.042,97 | 72,03 | 2.696.430.717,26 | 7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Krucil | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 10.192.000 | | 11.211.200 | | 12.332.320 | | 13.565.552 | | 14.922.107 | | |
| Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Tepat Waktu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | 8 | 10.192.000 | 8 | 11.211.200 | 8 | 12.332.320 | 8 | 13.565.552 | 8 | 14.922.107 | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4.992.000 | | 5.491.200 | | 6.040.320 | | 6.644.352 | | 7.308.787 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 7 | 4.992.000 | 7 | 5.491.200 | 7 | 6.040.320 | 7 | 6.644.352 | 7 | 7.308.787 | | |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 5.200.000 | | 5.720.000 | | 6.292.000 | | 6.921.200 | | 7.613.320 | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP ((Dokumen) | 4 | 8 | 5.200.000 | 8 | 5.720.000 | 8 | 6.292.000 | 8 | 6.921.200 | 8 | 7.613.320 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.335.439.815 | | 2.345.336.812,22 | | 2.363.379.769,36 | | 2.394.204.706,12 | | 2.431.939.747,32 | | |
| Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 2.335.439.815 | 12 | 2.345.336.812,22 | 12 | 2.363.379.769,36 | 12 | 2.394.204.706,12 | 12 | 2.431.939.747,32 | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 210 | 210 | | 210 | | 210 | | 210 | | 210 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.314.439.815 | | 2.322.236.812,22 | | 2.337.969.769,36 | | 2.366.253.706,12 | | 2.401.193.647,32 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 210 | 210 | 2.314.439.815 | 210 | 2.322.236.812,22 | 210 | 2.337.969.769,36 | 210 | 2.366.253.706,12 | 210 | 2.401.193.647,32 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 21.000.000 | | 23.100.000 | | 25.410.000 | | 27.951.000 | | 30.746.100 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 21.000.000 | 12 | 23.100.000 | 12 | 25.410.000 | 12 | 27.951.000 | 12 | 30.746.100 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 71.488.999,59 | | 78.637.899,55 | | 86.501.689,5 | | 95.151.858,85 | | 104.667.043,94 | | |
| Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 2 | 71.488.999,59 | 2 | 78.637.899,55 | 2 | 86.501.689,5 | 2 | 95.151.858,85 | 2 | 104.667.043,94 | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 17.349.600 | | 19.084.560 | | 20.993.016 | | 23.092.318 | | 25.401.549 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 2 | 17.349.600 | 2 | 19.084.560 | 2 | 20.993.016 | 2 | 23.092.318 | 2 | 25.401.549 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 54.139.399,59 | | 59.553.339,55 | | 65.508.673,5 | | 72.059.540,85 | | 79.265.494,94 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 54.139.399,59 | 12 | 59.553.339,55 | 12 | 65.508.673,5 | 12 | 72.059.540,85 | 12 | 79.265.494,94 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 13.719.000 | | 15.090.900 | | 16.599.990 | | 18.259.989 | | 20.085.988 | | |
| Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | 4 | 13.719.000 | 4 | 15.090.900 | 4 | 16.599.990 | 4 | 18.259.989 | 4 | 20.085.988 | | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 13.719.000 | | 15.090.900 | | 16.599.990 | | 18.259.989 | | 20.085.988 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 3 | 13.719.000 | 3 | 15.090.900 | 3 | 16.599.990 | 3 | 18.259.989 | 3 | 20.085.988 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 73.250.892 | | 80.575.981 | | 88.633.579 | | 97.496.937 | | 107.246.631 | | |
| Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 73.250.892 | 12 | 80.575.981 | 12 | 88.633.579 | 12 | 97.496.937 | 12 | 107.246.631 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 21.357.900 | | 23.493.690 | | 25.843.059 | | 28.427.365 | | 31.270.101 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 21.357.900 | 12 | 23.493.690 | 12 | 25.843.059 | 12 | 28.427.365 | 12 | 31.270.101 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 51.892.992 | | 57.082.291 | | 62.790.520 | | 69.069.572 | | 75.976.530 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 51.892.992 | 12 | 57.082.291 | 12 | 62.790.520 | 12 | 69.069.572 | 12 | 75.976.530 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 2.000.000 | | 13.200.000 | | 14.520.000 | | 15.972.000 | | 17.569.200 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2 | 12.000.000 | 2 | 13.200.000 | 2 | 14.520.000 | 2 | 15.972.000 | 2 | 17.569.200 | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 12.000.000 | | 13.200.000 | | 14.520.000 | | 15.972.000 | | 17.569.200 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 8 | 12.000.000 | 8 | 13.200.000 | 8 | 14.520.000 | 8 | 15.972.000 | 8 | 17.569.200 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 32.400.000 | | 32.760.071,12 | | 33.248.301,36 | | 33.926.715,59 | | 34.722.259,82 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 32.400.000 | 100 | 32.760.071,12 | 100 | 33.248.301,36 | 100 | 33.926.715,59 | 100 | 34.722.259,82 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Krucil | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 18.000.000 | | 19.800.000 | | 21.780.000 | | 23.958.000 | | 26.353.800 | | |
| Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana dengan Baik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 6 | 9 | 18.000.000 | 9 | 19.800.000 | 9 | 21.780.000 | 9 | 23.958.000 | 9 | 26.353.800 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | | | | 18.000.000 | | 19.800.000 | | 21.780.000 | | 23.958.000 | | 26.353.800 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 6 | 9 | 18.000.000 | 9 | 19.800.000 | 9 | 21.780.000 | 9 | 23.958.000 | 9 | 26.353.800 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 14.400.000 | | 12.960.071,12 | | 11.468.301,36 | | 9.968.715,59 | | 8.368.459,82 | | |
| Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 6 | 6 | 14.400.000 | 6 | 12.960.071,12 | 6 | 11.468.301,36 | 6 | .968.715,59 | 6 | 8.368.459,82 | | |
| 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | 14.400.000 | | 12.960.071,12 | | 11.468.301,36 | | 9.968.715,59 | | 8.368.459,82 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 6 | 6 | 14.400.000 | 6 | 12.960.071,12 | 6 | 11.468.301,36 | 6 | 9.968.715,59 | 6 | 8.368.459,82 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 44.400.000 | | 44.893.430,79 | | 45.562.487,05 | | 46.492.165,8 | | 47.582.356,05 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan (%) | 100 | 100 | 44.400.000 | 100 | 44.893.430,79 | 100 | 45.562.487,05 | 100 | 46.492.165,8 | 100 | 7.582.356,05 | 7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Krucil | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 22.800.000 | | 25.080.000 | | 27.588.000 | | 30.346.800 | | 33.381.480 | | |
| Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 22.800.000 | 3 | 25.080.000 | 3 | 27.588.000 | 3 | 30.346.800 | 3 | 33.381.480 | | |
| | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 12 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 22.800.000 | | 25.080.000 | | 27.588.000 | | 30.346.800 | | 33.381.480 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 12 | 8 | 22.800.000 | 8 | 25.080.000 | 8 | 27.588.000 | 8 | 30.346.800 | 8 | 33.381.480 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 7.01.03.2.01.0003 – Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 21.600.000 | | 19.813.430,79 | | 17.974.487,05 | | 16.145.365,8 | | 14.200.876,05 | | |
| Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 350 | 350 | 21.600.000 | 350 | 19.813.430,79 | 350 | 17.974.487,05 | 350 | 16.145.365,8 | 350 | 14.200.876,05 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 350 | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 7.200.000 | | 7.920.000 | | 8.712.000 | | 9.583.200 | | 10.541.520 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 350 | 350 | 7.200.000 | 350 | 7.920.000 | 350 | 8.712.000 | 350 | 9.583.200 | 350 | 10.541.520 | | |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 14.400.000 | | 11.893.430,79 | | 9.262.487,05 | | 6.562.165,8 | | 3.659.356,05 | | |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 350 | 350 | 14.400.000 | 350 | 11.893.430,79 | 350 | 9.262.487,05 | 350 | 6.562.165,8 | 350 | 3.659.356,05 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 41.400.000 | | 41.860.090,87 | | 42.483.940,63 | | 43.350.803,25 | | 44.367.331,99 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 41.400.000 | 100 | 41.860.090,87 | 100 | 2.483.940,63 | 100 | 43.350.803,25 | 100 | 44.367.331,99 | 7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Krucil | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 41.400.000 | | 41.860.090,87 | | 42.483.940,63 | | 43.350.803,25 | | 44.367.331,99 | | |
| Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | 41.400.000 | 14 | 41.860.090,87 | 14 | 42.483.940,63 | 14 | 43.350.803,25 | 14 | 44.367.331,99 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 41.400.000 | | 41.860.090,87 | | 42.483.940,63 | | 43.350.803,25 | | 44.367.331,99 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | 41.400.000 | 14 | 41.860.090,87 | 14 | 42.483.940,63 | 14 | 43.350.803,25 | 14 | 44.367.331,99 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 36.200.000 | | 36.602.301,68 | | 37.147.793,5 | | 37.905.774,82 | | 38.794.623,62 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 36.200.000 | 100 | 36.602.301,68 | 100 | 37.147.793,5 | 100 | 37.905.774,82 | 100 | 38.794.623,62 | 7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Krucil | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 36.200.000 | | 36.602.301,68 | | 37.147.793,5 | | 37.905.774,82 | | 38.794.623,62 | | |
| Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.025 | 1.025 | 36.200.000 | 1.025 | 36.602.301,68 | 1.025 | 37.147.793,5 | 1.025 | 37.905.774,82 | 1.025 | 38.794.623,62 | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 36.200.000 | | 36.602.301,68 | | 37.147.793,5 | | 37.905.774,82 | | 38.794.623,62 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.025 | 1.025 | 36.200.000 | 1.025 | 36.602.301,68 | 1.025 | 37.147.793,5 | 1.025 | 37.905.774,82 | 1.025 | 38.794.623,62 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 32.200.000 | | 32.557.848,46 | | 33.043.064,94 | | 33.717.291,42 | | 34.507.924,88 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 32.200.000 | 100 | 32.557.848,46 | 100 | 33.043.064,94 | 100 | 33.717.291,42 | 100 | 34.507.924,88 | 7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Krucil | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 32.200.000 | | 32.557.848,46 | | 33.043.064,94 | | 33.717.291,42 | | 34.507.924,88 | | |
| Terwujudnya Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang Bersih dan Baik | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 18 | 2 | 32.200.000 | 2 | 32.557.848,46 | 2 | 33.043.064,94 | 2 | 33.717.291,42 | 2 | 34.507.924,88 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 14 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 18 | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 14 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 5.800.000 | | 6.380.000 | | 7.018.000 | | 7.719.800 | | 8.491.780 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan | 14 | 2 | 5.800.000 | 2 | 6.380.000 | 2 | 7.018.000 | 2 | 7.719.800 | 2 | 8.491.780 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 9.600.000 | | 10.560.000 | | 11.616.000 | | 12.777.600 | | 14.055.360 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 14 | 2 | 9.600.000 | 2 | 10.560.000 | 2 | 11.616.000 | 2 | 12.777.600 | 2 | 14.055.360 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 7.200.000 | | 7.920.000 | | 8.712.000 | | 9.583.200 | | 10.541.520 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 18 | 2 | 7.200.000 | 2 | 7.920.000 | 2 | 8.712.000 | 2 | 9.583.200 | 2 | 10.541.520 | | |
| 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 9.600.000 | | 7.697.848,46 | | 5.697.064,94 | | 3.636.691,42 | | 1.419.264,88 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 18 | 2 | 9.600.000 | | 7.697.848,46 | 2 | 5.697.064,94 | 2 | 3.636.691,42 | 2 | 1.419.264,88 | | |

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Isu Strategis, Sasaran Utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan Daerah. Kecamatan tidak terdapat Program Prioritas dikarenakan Kecamatan sebagai fasilitator dari Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam mendukung terlaksananya Program Prioritas tersebut.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Krucil** | | | | |
| 1 | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 – Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan | |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Krucil sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Krucil

| NO | INDIKATOR | SAT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.15.0000 – Kecamatan Krucil | | | | | | | | | |
| 2. | Indeks kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 91,00 | |
| 3. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 82,00 | 82,82 | 83,65 | 84,48 | 85,33 | 86,18 | 87,04 | |
| 4. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 71,81 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Krucil sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Krucil

| NO | INDIKATOR | STATUS | SAT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 7.01 - KECAMATAN | | | | | | | | | | |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Positif | Indeks | 82,00 | 82,82 | 83,65 | 84,48 | 85,33 | 86,18 | 87,04 | |

# BAB V

# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Krucil.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Krucil.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, September 2025
**CAMAT KRUCIL**
KABUPATEN PROBOLINGGO

**FEBRYA ILHAM HIDAYAT, ST, MM**
Pembina Tingkat I
NIP. 19690208 200312 1 005

# RENCANA STRATEGIS

# ( RENSTRA )

# KECAMATAN KURIPAN

# TAHUN 2025-2029

**KECAMATAN KURIPAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuripan Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Kuripan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Kuripan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kuripan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Kuripan dengan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo.

Kuripan, 26 September 2025

CAMAT KURIPAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**TAUFIQ, S.STP**
Pembina Tingkat I
NIP. 19870415 200602 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 6
1.4 Sistematika Penulisan ..... 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kuripan ..... 10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kuripan ..... 17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuripan ..... 21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 27
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Kuripan .... 27
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Kuripan ..... 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kuripan Tahun 2025-2029 ..... 32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kuripan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 40
4.1 Uraian Program ..... 40
4.2 Uraian Kegiatan ..... 44
BAB V PENUTUP ..... 81
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 81
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 82

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..……..…. 18
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ……..…… 19
Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..….. 19
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ……. 22
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo (2020-2024) …… 23
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Kuripan ……..… 30
Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 …….. 35
Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Kuripan …… 36
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Kuripan ……... 38
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Kuripan …… 33
Tabel 4.1 Program Kecamatan Kuripan ……. 42
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kuripan ……. 45
Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Kuripan …….. 58
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kuripan ……. 63
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… 79
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuripan …….. 80
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kuripan …… 80

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kuripan ……..… 17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo ..…. 33
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah …… 34
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kuripan …….. 45

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Kuripan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kuripan setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Kuripan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Kuripan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Kuripan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Kuripan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuripan yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Kuripan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Kuripan berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Kuripan dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Kuripan disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Kuripan akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Kuripan dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Kuripan untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Kuripan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan

Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta Pembangunan wilayah melalui Perencanaan yang sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KURIPAN**

Bab II memuat :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kuripan
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kuripan
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuripan
2.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Kuripan
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kuripan

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kuripan Tahun 2025-2029
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kuripan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kuripan 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuripan; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kuripan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Kuripan Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana,

pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
   b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
   c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan

keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;

d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi

pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Kuripan**

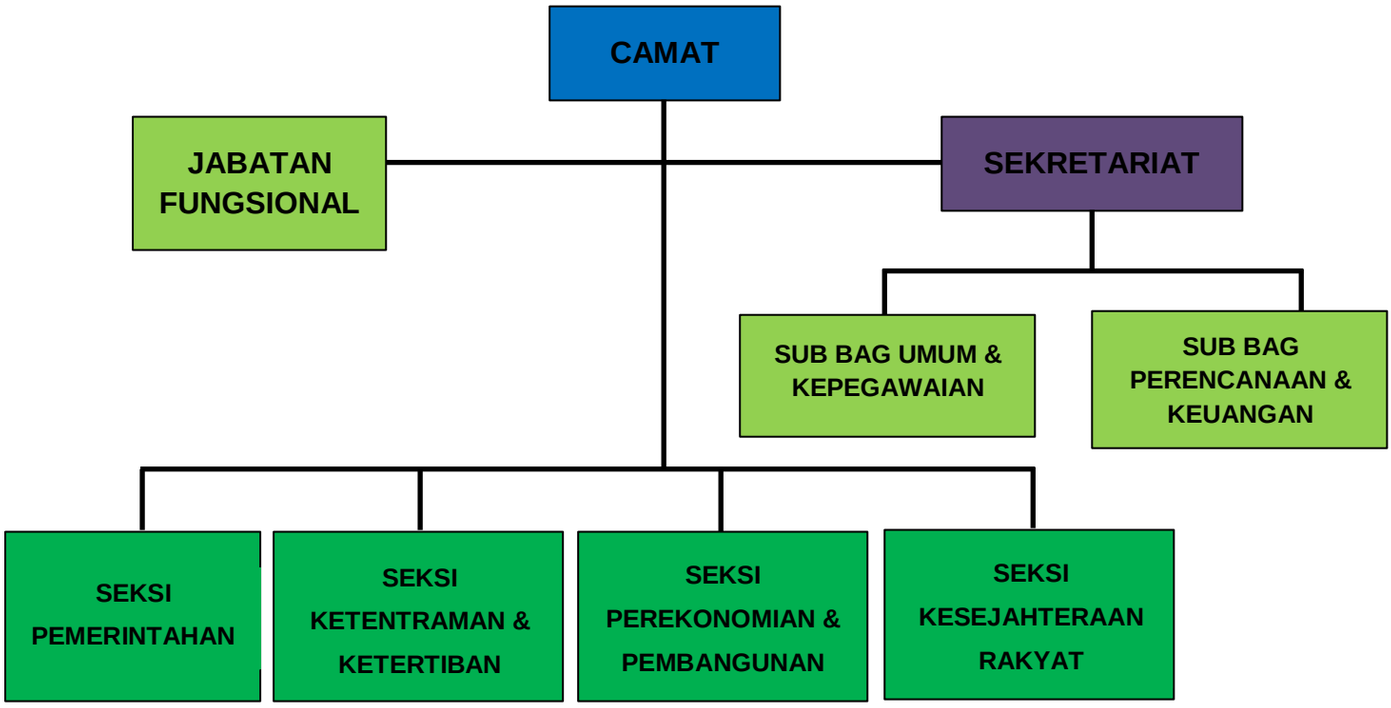


Struktur Organisasi Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kuripan

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Kuripan.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Kuripan sebanyak 23 orang dengan rincian : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 15 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 3 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 5 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Kuripan berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | **5** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | **2** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | **3** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | **3** |
| 10. | Honorer | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | **5** |
| **Jumlah** | | **0** | **1** | **10** | **0** | **10** | **2** | **19** | **4** | **23** |

***Sumber Data : Kecamatan Kuripan***

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan**

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | **19** | 1 | 4 | 10 | 4 | **19** |
| 2. | Perempuan | - | 1 | - | - | 2 | 1 | **4** | - | - | 3 | 1 | **4** |
| **Jumlah** | | **-** | **7** | **7** | **1** | **3** | **5** | **23** | **1** | **4** | **13** | **5** | **23** |

***Sumber Data : Kecamatan Kuripan***

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.3**

**Jumlah Sarana Prasarana**

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak Berat (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lain-lain Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Lain-lain tugu/tanda batas | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Portable Generating Set | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Genset | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kursi Kerja | 17 | 16 | 1 |
| 11 | Kursi Lipat | 15 | 13 | 2 |
| 12 | P.C Unit | 11 | 7 | 4 |
| 13 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 19 | 18 | 1 |
| 14 | Sepeda Motor | 10 | 7 | 3 |
| 15 | Sport Utility Vehicle (SUV) | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Mesin Fotocopy Double Folio | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Lemari Besi/Metal | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Lemari Kayu | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Filing Cabinet Besi | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Brandkas | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Lemari Kaca | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Alat Penghancur Kertas | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Mesin Absensi | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Papan Pengumuman | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Meja Kerja Kayu | 7 | 7 | 0 |
| 26 | Kursi Besi/Metal | 70 | 70 | 0 |
| 27 | Meja Rapat | 4 | 4 | 0 |
| 28 | Meja Resepsionis | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Meja 1/2 Biro | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Kasur/Spring Bed | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Kursi Rapat | 42 | 42 | 0 |
| 32 | Kursi Tamu | 4 | 4 | 0 |
| 33 | Bangku Tunggu | 2 | 2 | 0 |
| 34 | Filling Besi/Metal | 2 | 2 | 0 |
| 35 | Lemari Es | 1 | 1 | 0 |
| 36 | A.C. Window | 3 | 3 | 0 |
| 37 | A.C. Split | 2 | 2 | 0 |
| 38 | A.C. Unit | 2 | 2 | 0 |
| 39 | Kipas Angin | 5 | 5 | 0 |
| 40 | Televisi | 6 | 6 | 0 |
| 41 | Sound System | 2 | 2 | 0 |
| 42 | Dispenser | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Mimbar/Podium | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Karpet | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Gordyin/Kray | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Mesin Pompa Air | 2 | 2 | 0 |
| 47 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Meja Tamu Biasa | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 5 | 5 | 0 |
| 52 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Camera Electronic | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Layar Film/Projector | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Wireless Amplifier | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Antene SHF Portable | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Termometer Mercury Untuk Suhu Badan | 3 | 3 | 0 |
| 58 | Lap Top | 13 | 13 | 0 |
| 59 | Note Book | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 1 | 1 | 0 |
| 61 | External/ Portable Hardisk | 3 | 3 | 0 |
| 62 | Hard disk Eksternal | 7 | 7 | 0 |
| 65 | Monitor | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 1 | 0 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Lain-lain Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Jam Elektronik | 6 | 0 | 6 |
| 70 | Gambar Presiden | 2 | 0 | 2 |
| 71 | Facsimile | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Bibliografi, Katalog | 1 | 1 | 0 |

***Sumber Data : Kecamatan Kuripan***

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuripan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuripan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Kuripan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Kuripan dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

Target dan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 97,70 | 85,30 | 97,49 | - | - | 97,70 | 85,30 | 97,49 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 96,10 | 100 | 96,16 | - | - | 96,10 | 100,00 | 96,16 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 92,70 | 100 | 97,08 | - | - | 92,70 | 100,00 | 97,08 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 95,71 | - | - | - | - | 95,71 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 | 58,58 | 65,55 | 67,56 | 68,51 | 71,36 | 73,23 | 81,94 | 84,45 | 85,64 | 96,43 |

***Sumber Data : Kecamatan Kuripan***

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | **2.657.859.764,00** | **2.761.099.484,00** | **3.159.492.359,00** | - | - | **2.333.903.527,00** | **2.588.055.821,00** | **2.879.697.151,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **87,81** | **93,73** | **91,14** | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 16.108.800,00 | 8.812.500,00 | - | - | - | 6.652.900,00 | 7.005.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 41,30 | 79,49 | #DIV/0! | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 13.529.400,00 | 6.000.000,00 | - | | | 6.652.900,00 | 4.320.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 49,17 | 72,00 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | 430.000,00 | 2.012.500,00 | - | | | - | 1.929.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 95,85 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | 430.000,00 | - | - | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | 430.000,00 | 800.000,00 | - | | | - | 756.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 94,50 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | 430.000,00 | - | - | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | 430.000,00 | - | - | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 429.400,00 | - | - | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.377.106.864,00 | 2.515.409.284,00 | 2.923.986.068,00 | - | - | 2.158.624.905,00 | 2.390.735.659,00 | 2.656.446.392,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90,81 | 95,04 | 90,85 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | 2.243.328.000,00 | 2.397.295.620,00 | 2.908.276.068,00 | - | - | 2.041.043.745,00 | 2.292.066.707,00 | 2.642.146.392,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90,98 | 95,61 | 90,85 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | 131.478.864,00 | 116.348.864,00 | 15.710.000,00 | - | - | 117.581.160,00 | 97.504.952,00 | 14.300.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 89,43 | 83,80 | 91,02 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | 460.000,00 | 764.800,00 | - | - | - | - | 464.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 60,67 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | 460.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | - | 460.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | 460.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | 700.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 70,00 | #DIV/0! | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | 460.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 133.730.200,00 | 118.927.200,00 | 66.215.250,00 | - | - | 74.886.538,00 | 104.654.280,00 | 63.575.352,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 56,00 | 88,00 | 96,01 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | 2.217.500,00 | 2.589.800,00 | 3.025.000,00 | - | - | 2.198.000,00 | 1.800.000,00 | 2.640.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,12 | 69,50 | 87,27 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 47.719.700,00 | 37.280.000,00 | - | - | - | 4.514.800,00 | 35.609.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 9,46 | 95,52 | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | 3.118.900,00 | 3.632.500,00 | - | - | - | 2.360.000,00 | 1.802.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 75,67 | 49,61 | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | - | 20.496.000,00 | 17.436.600,00 | 29.690.250,00 | - | - | 14.971.897,00 | 16.231.000,00 | 27.787.852,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 73,05 | 93,09 | 93,59 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | - | 1.583.500,00 | 172.300,00 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | 2.889.600,00 | 3.940.000,00 | - | - | - | 2.700.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,44 | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | 55.705.000,00 | 53.876.000,00 | 33.500.000,00 | - | - | 48.141.841,00 | 49.212.280,00 | 33.147.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86,42 | 91,34 | 98,95 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 125.913.900,00 | 66.950.500,00 | 113.291.041,00 | - | - | 90.545.184,00 | 43.347.082,00 | 104.741.185,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 71,91 | 64,74 | 92,45 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | 1.302.500,00 | 886.000,00 | - | - | - | 1.138.000,00 | 858.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 87,37 | 96,84 | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | 35.000.000,00 | 35.688.300,00 | 34.924.750,00 | | - | 17.940.284,00 | 18.739.082,00 | 32.309.257,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 51,26 | 52,51 | 92,51 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 21.611.400,00 | 15.202.800,00 | 5.720.000,00 | | - | 14.335.800,00 | 14.200.000,00 | 5.715.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 66,33 | 93,40 | 99,91 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | 68.000.000,00 | 15.173.400,00 | 72.646.291,00 | | - | 57.131.100,00 | 9.550.000,00 | 66.716.928,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84,02 | 62,94 | 91,84 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.000.000,00 | 51.000.000,00 | 56.000.000,00 | - | - | 3.194.000,00 | 42.313.800,00 | 54.934.222,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 63,88 | 82,97 | 98,10 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | 5.000.000,00 | 17.000.000,00 | 22.000.000,00 | | - | 3.194.000,00 | 8.313.800,00 | 20.980.832,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 63,88 | 48,90 | 95,37 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | - | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | | - | - | 34.000.000,00 | 33.953.390,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 99,86 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | **29.300.000,00** | **57.691.000,00** | **6.550.000,00** | **-** | **-** | **14.800.000,00** | **33.400.000,00** | **5.865.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **50,51** | **57,89** | **89,54** | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 21.600.000,00 | 49.691.000,00 | 4.175.000,00 | - | - | 14.800.000,00 | 29.510.000,00 | 3.800.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 68,52 | 59,39 | 91,02 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | - | 20.000.000,00 | 35.091.000,00 | 4.175.000,00 | - | - | 14.800.000,00 | 21.605.000,00 | 3.800.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 74,00 | 61,57 | 91,02 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 1.600.000,00 | 14.600.000,00 | - | - | - | - | 7.905.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 54,14 | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 7.700.000,00 | 8.000.000,00 | 2.375.000,00 | - | - | - | 3.890.000,00 | 2.065.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 48,63 | 86,95 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | - | - | 4.500.000,00 | 8.000.000,00 | 2.375.000,00 | - | - | - | 3.890.000,00 | 2.065.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 48,63 | 86,95 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | - | 3.200.000,00 | - | | - | - | - | - | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | **102.960.000,00** | **284.187.200,00** | **3.575.000,00** | **-** | **-** | **87.205.000,00** | **229.788.500,00** | **3.520.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **84,70** | **80,86** | **98,46** | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 102.960.000,00 | 234.187.200,00 | 2.975.000,00 | - | - | 87.205.000,00 | 194.989.500,00 | 2.950.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84,70 | 83,26 | 99,16 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | 2.960.000,00 | - | 2.975.000,00 | - | - | 1.600.000,00 | - | 2.950.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 54,05 | #DIV/0! | 99,16 | | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | - | 100.000.000,00 | 234.187.200,00 | - | - | - | 85.605.000,00 | 194.989.500,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 85,61 | 83,26 | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 34.799.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 69,60 | #DIV/0! | | |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 34.799.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 69,60 | #DIV/0! | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | 600.000,00 | - | - | - | - | 570.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95,00 | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | - | 600.000,00 | - | - | - | - | 570.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95,00 | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | **57.709.000,00** | **39.158.000,00** | **38.625.000,00** | **-** | **-** | **30.330.000,00** | **36.475.000,00** | **37.612.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **52,56** | **93,15** | **97,38** | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 57.709.000,00 | 39.158.000,00 | 38.625.000,00 | - | - | 30.330.000,00 | 36.475.000,00 | 37.612.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 52,56 | 93,15 | 97,38 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | 55.309.000,00 | 35.158.000,00 | 38.625.000,00 | - | - | 30.330.000,00 | 33.700.000,00 | 37.612.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 54,84 | 95,85 | 97,38 | | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | 2.400.000,00 | 4.000.000,00 | - | - | - | - | 2.775.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 69,38 | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | **33.378.100,00** | **38.800,00** | **-** | **-** | **-** | **13.630.000,00** | **-** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **40,84** | **-** | **#DIV/0!** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 33.378.100,00 | 38.800,00 | - | - | - | 13.630.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 40,84 | - | #DIV/0! | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | - | 33.378.100,00 | 38.800,00 | - | - | - | 13.630.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 40,84 | 0,00 | #DIV/0! | | |
| **Jumlah** | **-** | **-** | **2.881.206.864,00** | **3.142.174.484,00** | **3.208.242.359,00** | **-** | **-** | **2.479.868.527,00** | **2.887.719.321,00** | **2.926.694.151,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **86,07** | **91,90** | **91,22** | | |

***Sumber Data : Kecamatan Kuripan***

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah Kecamatan Kuripan :

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kuripan

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan :

- **Keterbatasan Sumber Daya** : Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur** : Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.
- **Birokrasi yang Kaku** : Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.

- **Akses dan Kesenjangan Digital** : Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah** : Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital** : Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar-Sektor** : Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur** : Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu** : Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat** : Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kuripan

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Kuripan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

**Tabel 2.6**

**Isu Strategis Kecamatan Kuripan**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti kawasan pegunungan | Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br><br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br><br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, serta kehutanan | Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

***Sumber Data : Kecamatan Kuripan***

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kuripan Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Kuripan Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuripan, dalam hal ini Kecamatan Kuripan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang

tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Kuripan Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

**Gambar 3.1**

**Konsep Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo**

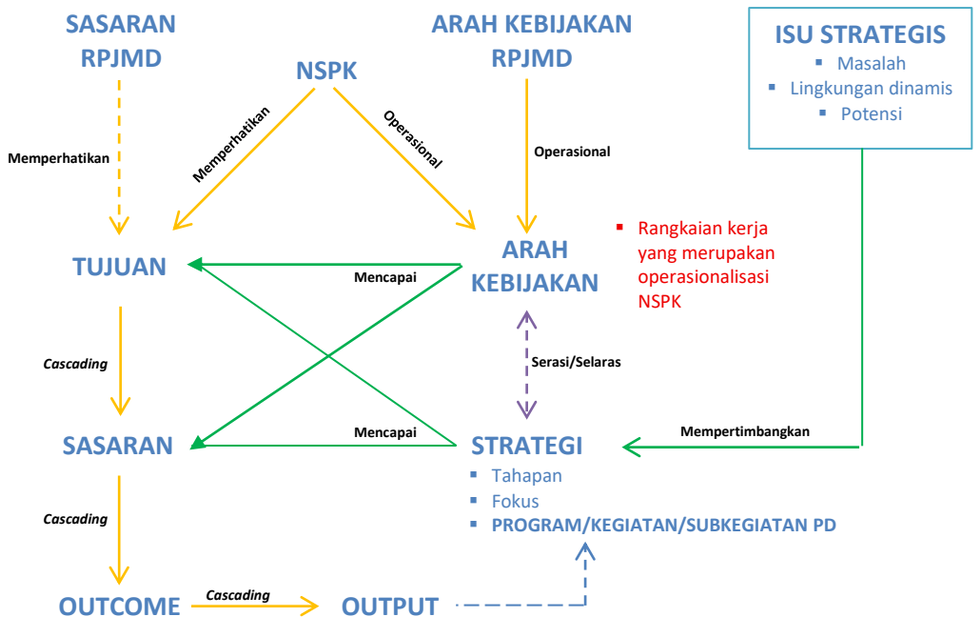


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan

Kuripan Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.2**

**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**

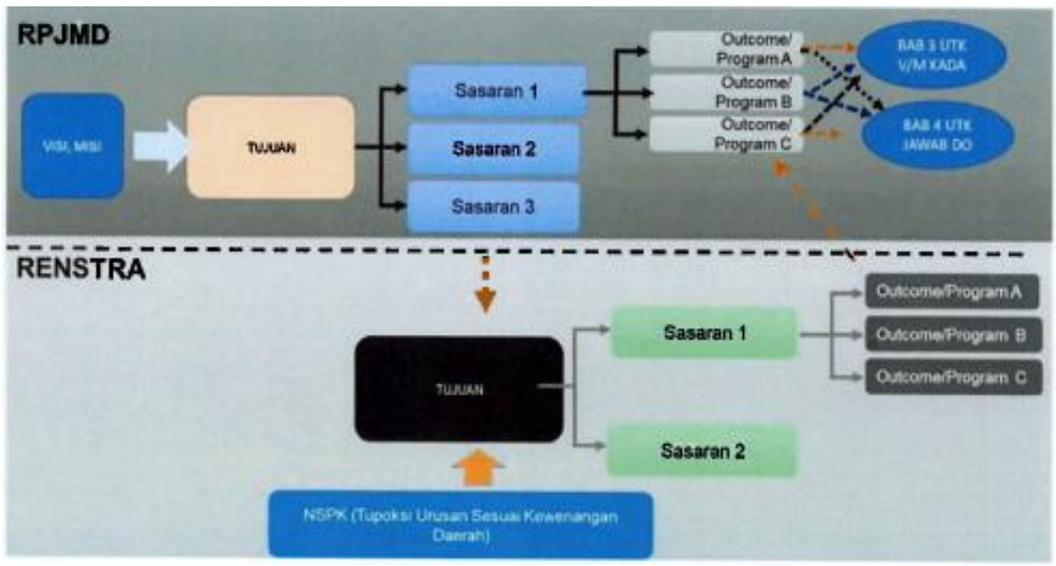


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.1**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kuripan**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kuripan** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 85,13 | 85,98 | 86,84 | 87,71 | 88,59 | 89,47 | 90,37 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, diperlukan Misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program

kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuripan

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

**Tabel 3.1.2**

**Definisi Operasional IKU Kecamatan Kuripan**

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut : $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai hasil atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1) ——————————— X 100<br>Nilai LHE AKIP tahun (n-1)<br><br>Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Kuripan***

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kuripan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Kuripan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

## B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Kuripan

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Kuripan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Kecamatan Kuripan**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

***Sumber Data : Kecamatan Kuripan***

## C. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Kuripan

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Kuripan sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Kuripan :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Kuripan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada

setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Kuripan, sebagai berikut

**Tabel 3.3**

**Arah Kebijakan Kecamatan Kuripan**

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul; | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

***Sumber Data : Kecamatan Kuripan***

# BAB IV

# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahun, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman,

ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

## Tabel 4.1

## Program Kecamatan Kuripan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 3.114.836.591,14 | | 3.149.452.723,60 | | 3.196.389.681,50 | | 3.261.610.343,40 | | 3.338.091.524,91 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.067.217.491,14 | | 3.101.304.417,98 | | 3.147.523.811,51 | | 3.211.747.390,86 | | 3.287.059.340,89 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 71,36 | 71,4 | 71,43 | 3.067.217.491,14 | 71,47 | 3.101.304.417,98 | 71,5 | 3.147.523.811,51 | 71,54 | 3.211.747.390,86 | 71,57 | 3.287.059.340,89 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 8.700.000 | | 8.796.685,76 | | 8.927.784,63 | | 9.109.951,41 | | 9.323.569,77 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 8.700.000 | 100 | 8.796.685,76 | 100 | 8.927.784,63 | 100 | 9.109.951,41 | 100 | 9.323.569,77 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 11.481.000 | | 11.608.591,87 | | 11.781.597,16 | | 12.021.994,50 | | 12.303.897,07 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 11.481.000 | 100 | 11.608.591,87 | 100 | 11.781.597,16 | 100 | 12.021.994,50 | 100 | 12.303.897,07 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 25.438.100 | | 25.720.801,39 | | 26.104.123,92 | | 26.636.764,93 | | 27.261.367,82 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 25.438.100 | 100 | 25.720.801,39 | 100 | 26.104.123,92 | 100 | 26.636.764,93 | 100 | 27.261.367,82 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 1.000.000 | | 1.011.113,30 | | 1.026.182,14 | | 1.047.120,85 | | 1.071.674,68 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.011.113,30 | 100 | 1.026.182,14 | 100 | 1.047.120,85 | 100 | 1.071.674,68 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 1.000.000 | | 1.011.113,30 | | 1.026.182,14 | | 1.047.120,85 | | 1.071.674,68 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.011.113,30 | 100 | 1.026.182,14 | 100 | 1.047.120,85 | 100 | 1.071.674,68 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 3.114.836.591,14 | | 3.149.452.723,60 | | 3.196.389.681,50 | | 3.261.610.343,40 | | 3.338.091.524,91 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 4.1**

**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kuripan**

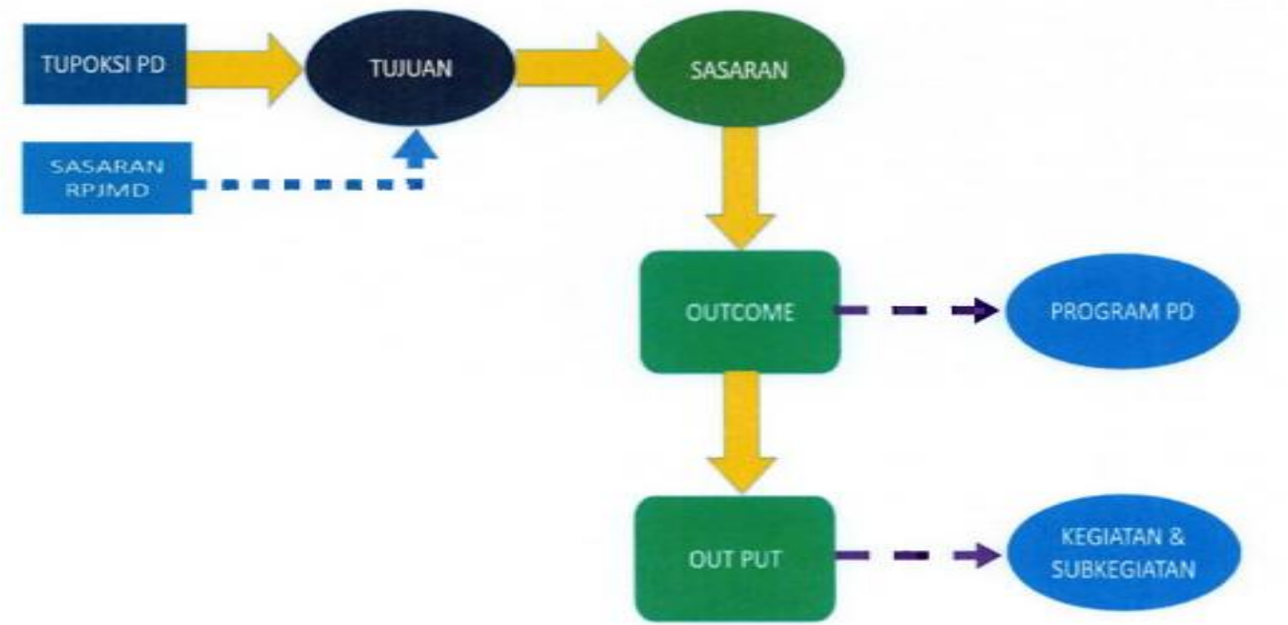


**Tabel 4.2**

**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Kuripan**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kuripan** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | |
| | | | | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2.1**

**Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Kuripan**

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | Persentase jumlah Desa dan/atau Kelurahan di wilayah kecamatan yang menunjukkan keaktifan tinggi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terstruktur, formal, dan berkelanjutan dalam periode satu tahun. Keaktifan ini diukur melalui partisipasi lembaga resmi (seperti BPD/LPM, PKK, Karang Taruna) dan/atau ketuntasan agenda pembangunan utama yang dikoordinasikan oleh Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan yang mencapai kriteria keaktifa n dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Penyusunan dokumen kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah | Jumlah dokumen pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan yang sudah diberdayakan dibagi Jumlah total dokumen pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Penyusunan dokumen data profil dan pemetaan wilayah desa/kelurahan | Jumlah dokumen profil dan pemetaan wilayah desa/kelurahan yang sudah terdata dibagi Jumlah total dokumen data profil dan pemetaan wilayah desa/kelurahan |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | Persentase jumlah kegiatan fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan/Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam rangka pembinaan dan dukungan terhadap program kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan dan seluruh PKK Kelurahan/Desa di wilayahnya, dibandingkan dengan total seluruh target fasilitasi yang direncanakan dalam periode satu tahun | Jumlah Kegiatan Fasilitasi PKK yang terlaksana dengan baik dibagi Total Jumlah Kegiatan Fasilitasi PKK yang direncanakan |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | Persentase jumlah agenda koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Camat dan/atau staf Kecamatan dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), seperti Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pihak terkait lainnya (seperti Desa/Kelurahan atau tokoh | Jumlah Agenda Koordinasi Trantibum yang terlaksana dibagi Total Jumlah Agenda Koordinasi Trantibum yang direncanakan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | masyarakat), dalam rangka pencegahan, penanganan, atau pengawasan masalah ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, dibandingkan dengan total target agenda koordinasi yang direncanakan dalam periode yang sama | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Penyusunan dokumen atas laporan konflik/gangguan layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum baik secara lisan dan on line (Lapor Kand4) yang tertangani dengan baik dan tepat waktu | Jumlah dokumen laporan konflik/gangguan Trantibum yang tertangani dibagi Jumlah laporan konflik/gangguan Trantibum yang masuk |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | Persentase jumlah agenda fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan tugas terkait Urusan Pemerintahan Umum (UPU) yang didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada Camat yang telah terlaksana dan selesai secara tuntas dalam periode satu tahun, dibandingkan dengan total seluruh agenda UPU yang ditargetkan. Agenda UPU ini mencakup pembinaan wawasan kebangsaan, penanganan konflik sosial, koordinasi ketenteraman, dan pelaksanaan kebijakan umum pemerintah di wilayah kecamatan. | Jumlah Agenda Urusan Pemerintahan Umum yang telah terlaksana/tuntas dibagi Total Jumlah Agenda Urusan Pemerintahan umum yang ditargetkan |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase tingkat keterlaksanaan atau ketuntasan seluruh agenda, tugas, atau program kerja yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Umum (UPU) yang didelegasikan oleh Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) kepada Camat dalam suatu periode tertentu. Urusan ini umumnya mencakup pembinaan wawasan kebangsaan, penanganan konflik sosial, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta koordinasi penyelenggaraan pemilihan | Jumlah Agenda Urusan Pemerintahan Umum yang telah dilaksanakan/tuntas dibagi Total Jumlah Agenda Urusan Pemerintahan Umum yang ditergetkan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | umum/pemilihan kepala daerah di wilayah kecamatan | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | Persentase jumlah Desa dan Kelurahan di wilayah kecamatan yang telah menerima minimal satu kegiatan pembinaan dan/atau satu kegiatan pengawasan dari Kantor Kecamatan dalam periode satu tahun. Kegiatan ini mencakup bimbingan teknis, fasilitasi, atau monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, manajemen keuangan, dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan, dibandingkan dengan total seluruh Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah kerja Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan yang menerima Pembinaan dan Pengawasan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Kegiatan Pemerintahan yang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang terselesaikan dibagi Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Kuripan***

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

## Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kuripan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 3.114.836.591,14 | | 3.149.452.723,6 | | 3.196.389.681,5 | | 3.261.610.343,4 | | 3.338.091.524,91 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 3.067.217.491,14 | | 3.101.304.417,98 | | 3.147.523.811,51 | | 3.211.747.390,86 | | 3.287.059.340,89 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 71,36 | 71,43 | 3.067.217.491,14 | 71,47 | 3.101.304.417,98 | 71,5 | 3.147.523.811,51 | 71,54 | 3.211.747.390,86 | 71,57 | 3.287.059.340,89 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kuripan | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.800.000 | | 1.818.000 | | 1.845.000 | | 1.881.000 | | 1.926.000 | | |
| Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | 20 | 1.800.000 | 20 | 1.818.000 | 20 | 1.845.000 | 20 | 1.881.000 | 20 | 1.926.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 600.000 | | 606.000 | | 615.000 | | 627.000 | | 642.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 7 | 600.000 | 7 | 606.000 | 7 | 615.000 | 7 | 627.000 | 7 | 642.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 600.000 | | 606.000 | | 615.000 | | 627.000 | | 642.000 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | 8 | 600.000 | 8 | 606.000 | 8 | 615.000 | 8 | 627.000 | 8 | 642.000 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 600.000 | | 606.000 | | 615.000 | | 627.000 | | 642.000 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | 20 | 600.000 | 20 | 606.000 | 20 | 615.000 | 20 | 627.000 | 20 | 642.000 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.738.487.967, 14 | | 2.768.925.417, 98 | | 2.810.194.811, 51 | | 2.867.542.390, 86 | | 2.934.787.340, 89 | | |
| Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | 48 | 2.738.487.967, 14 | 48 | 2.768.925.417, 98 | 48 | 2.810.194.811, 51 | 48 | 2.867.542.390, 86 | 48 | 2.934.787.340, 89 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 23 | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.724.331.967,14 | | 2.754.625.417,98 | | 2.795.681.811,51 | | 2.852.733.390,86 | | 2.919.631.340,89 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 23 | 21 | 2.724.331.967,14 | 21 | 2.754.625.417,98 | 21 | 2.795.681.811,51 | 21 | 2.852.733.390,86 | 21 | 2.919.631.340,89 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 14.156.000 | | 14.300.000 | | 14.513.000 | | 14.809.000 | | 15.156.000 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 14.156.000 | 12 | 14.300.000 | 12 | 14.513.000 | 12 | 14.809.000 | 12 | 15.156.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 53.204.900 | | 53.795.000 | | 54.595.000 | | 55.707.000 | | 57.011.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 53.204.900 | 12 | 53.795.000 | 12 | 54.595.000 | 12 | 55.707.000 | 12 | 57.011.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.554.000 | | 4.604.000 | | 4.673.000 | | 4.768.000 | | 4.879.000 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 2 | 4.554.000 | 2 | 4.604.000 | 2 | 4.673.000 | 2 | 4.768.000 | 2 | 4.879.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 1.450.000 | | 1.466.000 | | 1.487.000 | | 1.517.000 | | 1.552.000 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 4 | 1.450.000 | 4 | 1.466.000 | 4 | 1.487.000 | 4 | 1.517.000 | 4 | 1.552.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 38.200.900 | | 38.625.000 | | 39.200.000 | | 39.999.000 | | 40.936.000 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 38.200.900 | 12 | 38.625.000 | 12 | 39.200.000 | 12 | 39.999.000 | 12 | 40.936.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 9.000.000 | | 9.100.000 | | 9.235.000 | | 9.423.000 | | 9.644.000 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.100.000 | 12 | 9.235.000 | 12 | 9.423.000 | 12 | 9.644.000 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 233.004.624 | | 235.600.000 | | 239.110.000 | | 243.987.000 | | 249.707.000 | | |
| Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 233.004.624 | 12 | 235.600.000 | 12 | 239.110.000 | 12 | 243.987.000 | 12 | 249.707.000 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 31.200.000 | | 31.550.000 | | 32.020.000 | | 32.673.000 | | 33.439.000 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 31.200.000 | 12 | 31.550.000 | 12 | 32.020.000 | 12 | 32.673.000 | 12 | 33.439.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 201.804.624 | | 204.050.000 | | 207.090.000 | | 211.314.000 | | 216.268.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 201.804.624 | 12 | 204.050.000 | 12 | 207.090.000 | 12 | 211.314.000 | 12 | 216.268.000 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 40.720.000 | | 41.166.000 | | 41.779.000 | | 42.630.000 | | 43.628.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 8 | 40.720.000 | 8 | 41.166.000 | 8 | 41.779.000 | 8 | 42.630.000 | 8 | 43.628.000 | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 19 | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 14.800.000 | | 14.960.000 | | 15.183.000 | | 15.492.000 | | 15.855.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 8 | 14.800.000 | 8 | 14.960.000 | 8 | 15.183.000 | 8 | 15.492.000 | 8 | 15.855.000 | | |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.520.000 | | 5.580.000 | | 5.663.000 | | 5.778.000 | | 5.913.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 19 | 19 | 5.520.000 | 19 | 5.580.000 | 19 | 5.663.000 | 19 | 5.778.000 | 19 | 5.913.000 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.400.000 | | 20.626.000 | | 20.933.000 | | 21.360.000 | | 21.860.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2 | 20.400.000 | 2 | 20.626.000 | 2 | 20.933.000 | 2 | 21.360.000 | 2 | 21.860.000 | | |
| 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 8.700.000 | | 8.796.685,76 | | 8.927.784,63 | | 9.109.951,41 | | 9.323.569,77 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 8.700.000 | 100 | 8.796.685,76 | 100 | 8.927.784,63 | 100 | 9.109.951,41 | 100 | 9.323.569,77 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kuripan | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 8.700.000 | | 8.796.685,76 | | 8.927.784,63 | | 9.109.951,41 | | 9.323.569,77 | | |
| Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 6 | 9 | 8.700.000 | 9 | 8.796.685,76 | 9 | 8.927.784,63 | 9 | 9.109.951,41 | 9 | 9.323.569,77 | | |
| | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 6.300.000 | | 6.370.685,76 | | 6.465.784,63 | | 6.597.951,41 | | 6.753.569,77 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 6 | 9 | 6.300.000 | 9 | 6.370.685,76 | 9 | 6.465.784,63 | 9 | 6.597.951,41 | 9 | 6.753.569,77 | | |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 2.400.000 | | 2.426.000 | | 2.462.000 | | 2.512.000 | | 2.570.000 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 2.400.000 | 3 | 2.426.000 | 3 | 2.462.000 | 3 | 2.512.000 | 3 | 2.570.000 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 11.481.000 | | 11.608.591,87 | | 11.781.597,16 | | 12.021.994,5 | | 12.303.897,07 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 11.481.000 | 100 | 11.608.591,87 | 100 | 11.781.597,16 | 100 | 12.021.994,5 | 100 | 12.303.897,07 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kuripan | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 9.481.000 | | 9.586.591,87 | | 9.729.597,16 | | 9.928.994,5 | | 10.161.897,07 | | |
| Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 9.481.000 | 3 | 9.586.591,87 | 3 | 9.729.597,16 | 3 | 9.928.994,5 | 3 | 10.161.897,07 | | |
| | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 12 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 6.281.000 | | 6.351.591,87 | | 6.446.597,16 | | 6.578.994,5 | | 6.733.897,07 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 12 | 8 | 6.281.000 | 8 | 6.351.591,87 | 8 | 6.446.597,16 | 8 | 6.578.994,5 | 8 | 6.733.897,07 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 3.200.000 | | 3.235.000 | | 3.283.000 | | 3.350.000 | | 3.428.000 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | 3.200.000 | 3 | 3.235.000 | 3 | 3.283.000 | 3 | 3.350.000 | 3 | 3.428.000 | | |
| 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | 2.000.000 | | 2.022.000 | | 2.052.000 | | 2.093.000 | | 2.142.000 | | |
| Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.022.000 | 1 | 2.052.000 | 1 | 2.093.000 | 1 | 2.142.000 | | |
| 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | 2.000.000 | | 2.022.000 | | 2.052.000 | | 2.093.000 | | 2.142.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.022.000 | 1 | 2.052.000 | 1 | 2.093.000 | 1 | 2.142.000 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 80 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 70 | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 70 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | | |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 80 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 25.438.100 | | 25.720.801,39 | | 26.104.123,92 | | 26.636.764,93 | | 27.261.367,82 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 25.438.100 | 100 | 25.720.801,39 | 100 | 26.104.123,92 | 100 | 26.636.764,93 | 100 | 27.261.367,82 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kuripan | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 25.438.100 | | 25.720.801,39 | | 26.104.123,92 | | 26.636.764,93 | | 27.261.367,82 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 4 | 4 | 25.438.100 | 4 | 25.720.801,39 | 4 | 26.104.123,92 | 4 | 26.636.764,93 | 4 | 27.261.367,82 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 19.438.100 | | 19.654.801,39 | | 19.948.123,92 | | 20.355.764,93 | | 20.833.367,82 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | 19.438.100 | 14 | 19.654.801,39 | 14 | 19.948.123,92 | 14 | 20.355.764,93 | 14 | 20.833.367,82 | | |
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 6.000.000 | | 6.066.000 | | 6.156.000 | | 6.281.000 | | 6.428.000 | | |
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 4 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.066.000 | 4 | 6.156.000 | 4 | 6.281.000 | 4 | 6.428.000 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 1.000.000 | | 1.011.113,3 | | 1.026.182,14 | | 1.047.120,85 | | 1.071.674,68 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.011.113,3 | 100 | 1.026.182,14 | 100 | 1.047.120,85 | 100 | 1.071.674,68 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kuripan | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 1.000.000 | | 1.011.113,3 | | 1.026.182,14 | | 1.047.120,85 | | 1.071.674,68 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 35 | 1.148 | 1.000.000 | 1.148 | 1.011.113,3 | 1.148 | 1.026.182,14 | 1.148 | 1.047.120,85 | 1.148 | 1.071.674,68 | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 1.000.000 | | 1.011.113,3 | | 1.026.182,14 | | 1.047.120,85 | | 1.071.674,68 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 35 | 1.148 | 1.000.000 | 1.148 | 1.011.113,3 | 1.148 | 1.026.182,14 | 1.148 | 1.047.120,85 | 1.148 | 1.071.674,68 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 1.000.000 | | 1.011.113,3 | | 1.026.182,14 | | 1.047.120,85 | | 1.071.674,68 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.011.113,3 | 100 | 1.026.182,14 | 100 | 1.047.120,85 | 100 | 1.071.674,68 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kuripan | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 1.000.000 | | 1.011.113,3 | | 1.026.182,14 | | 1.047.120,85 | | 1.071.674,68 | | |
| Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 14 | 2 | 1.000.000 | 2 | 1.011.113,3 | 2 | 1.026.182,14 | 2 | 1.047.120,85 | 2 | 1.071.674,68 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 18 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 14 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 1.000.000 | | 1.011.113,3 | | 1.026.182,14 | | 1.047.120,85 | | 1.071.674,68 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 14 | 2 | 1.000.000 | 2 | 1.011.113,3 | 2 | 1.026.182,14 | 2 | 1.047.120,85 | 2 | 1.071.674,68 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas. Penetapannya berlandaskan pada isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kemampuan pendanaan daerah. Secara eksplisit, Program Prioritas Kecamatan Kuripan dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kuripan** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE KERJA |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuripan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuripan**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kuripan | | | | | | | | | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 91,00 | |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 85,13 | 85,98 | 86,84 | 87,71 | 88,59 | 89,47 | 90,37 | |
| 3. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kuripan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kuripan**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | | | | | | | | | | |
| | **NIHIL** | | | | | | | | | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Kuripan.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Kuripan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Kuripan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Kuripan.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Kuripan. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;

2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;
3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

CAMAT KURIPAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**T. RUFIQ, S.STP**
Penata Tingkat I
NIP. 19870415 200602 1 001

# RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN KREJENGAN

KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN KREJENGAN

TAHUN 2025

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krejengan Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Krejengan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Krejengan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Krejengan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Krejengan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

Krejengan,22 September 2025

CAMAT KREJENGAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN KREJENGAN

**[illegible] HERIWAHJUDI,S.Sos,.M.Si**
Pembina Tingkat I
NIP. 19671208 198903 1 010

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 6
1.4 Sistematika Penulisan ..... 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Krejengan ..... 10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Krejengan ..... 17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Krejengan ..... 21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 27
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Krejengan .... 27
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Krejengan ..... 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Krejengan Tahun 2025-2029 ..... 32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Krejengan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 40
4.1 Uraian Program ..... 40
4.2 Uraian Kegiatan ..... 44
BAB V PENUTUP ..... 79
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 79
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 80

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..…….…..… 18
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ……..…… 19
Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..…….. 19
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ……. 22
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo (2020-2024) …… 23
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Krejengan ……..… 30
Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 …….. 35
Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Krejengan …… 36
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Krejengan ……..... 38
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Krejengan ……..…… 33
Tabel 4.1 Program Kecamatan Krejengan …… 42
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krejengan …… 45
Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Krejengan …….. 58
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Krejengan …… 61
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… 77
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Krejengan …….. 78
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Krejengan …… 78

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Krejengan ..... 17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo ..... 33
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah ..... 34
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krejengan ..... 45

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Krejengan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krejengan setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Krejengan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Krejengan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Krejengan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Krejengan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krejengan yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Krejengan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Krejengan berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Krejengan dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Krejengan disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Krejengan akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Krejengan dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Krejengan untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Krejengan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan

Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta Pembangunan wilayah melalui Perencanaan yang sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KREJENGAN**

Bab II memuat :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Krejengan
2.2 Sumber Daya Kecamatan Krejengan
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Krejengan
2.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Krejengan
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Krejengan

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Krejengan Tahun 2025-2029
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Krejengan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Krejengan 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Krejengan; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Krejengan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Krejengan Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
   b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;

c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;

b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Krejengan**

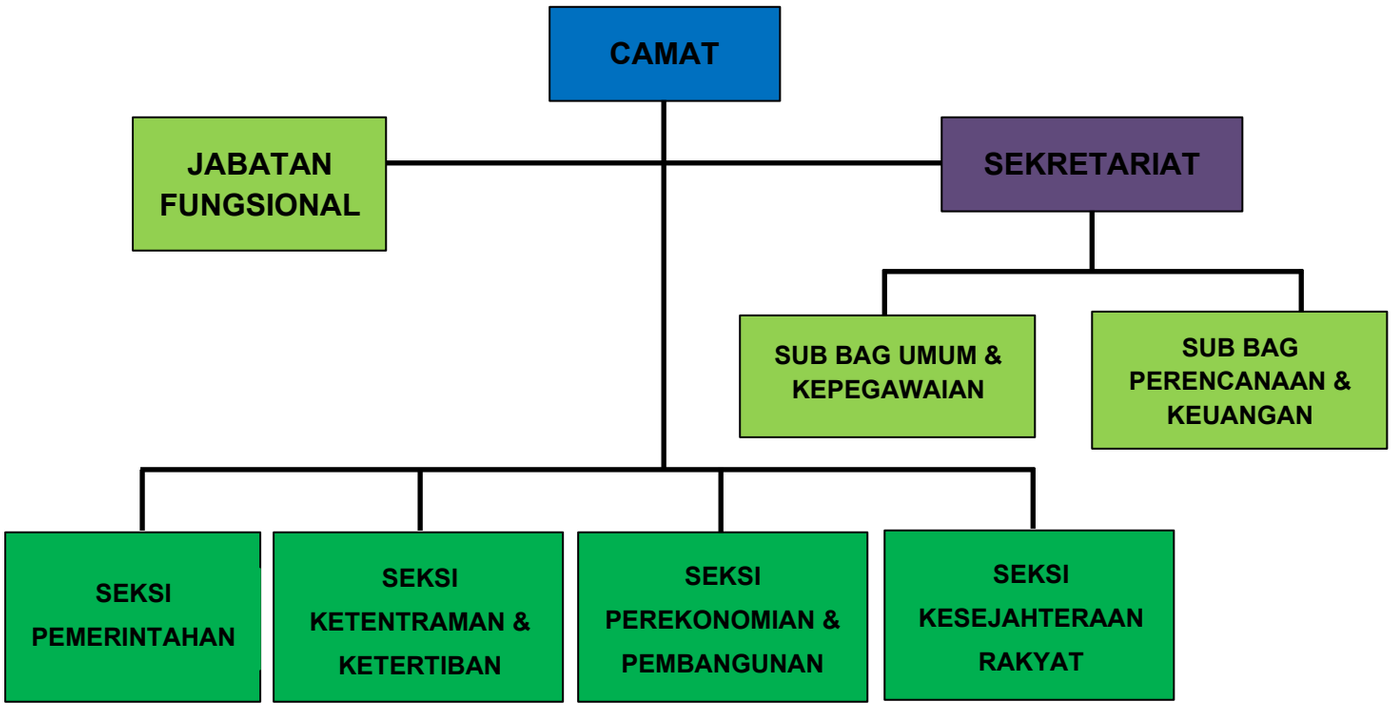


Struktur Organisasi Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Krejengan

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional

dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Krejengan.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Krejengan sebanyak 23 orang dengan rincian : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 15 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 3 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 5 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Krejengan berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **1** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | **2** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | **3** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| 10. | Honorer | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | **3** |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **1** | **0** | **6** | **6** | **13** | **2** | **15** |

***Sumber Data : Kecamatan Krejengan***

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan**

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | - | 7 | 2 | 1 | 3 | **13** | 1 | 2 | 7 | 3 | **13** |
| 2. | Perempuan | - | - | 1 | - | 1 | - | **2** | - | - | 2 | 0 | **2** |
| **Jumlah** | | **-** | **-** | **8** | **2** | **2** | **3** | **15** | **1** | **2** | **9** | **3** | **15** |

***Sumber Data : Kecamatan Krejengan***

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.3**

**Jumlah Sarana Prasarana**

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak Berat (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lain-lain Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Lain-lain tugu/tanda batas | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Portable Generating Set | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Genset | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kursi Kerja | 20 | 20 | 1 |
| 11 | Kursi Lipat | 0 | 0 | 0 |
| 12 | P.C Unit | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 8 | 7 | 1 |
| 14 | Sepeda Motor | 4 | 2 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Sport Utility Vehicle (SUV) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mesin Fotocopy Double Folio | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lemari Besi/Metal | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Lemari Kayu | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Filing Cabinet Besi | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Brandkas | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Lemari Kaca | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Alat Penghancur Kertas | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mesin Absensi | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Papan Pengumuman | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Meja Kerja Kayu | 10 | 10 | 0 |
| 26 | Kursi Besi/Metal | 50 | 50 | 0 |
| 27 | Meja Rapat | 4 | 4 | 0 |
| 28 | Meja Resepsionis | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Meja 1/2 Biro | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kasur/Spring Bed | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Kursi Rapat | 50 | 50 | 0 |
| 32 | Kursi Tamu | 4 | 4 | 0 |
| 33 | Bangku Tunggu | 2 | 2 | 0 |
| 34 | Filling Besi/Metal | 2 | 2 | 0 |
| 35 | Lemari Es | 1 | 1 | 0 |
| 36 | A.C. Window | 3 | 3 | 0 |
| 37 | A.C. Split | 2 | 2 | 0 |
| 38 | A.C. Unit | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kipas Angin | 5 | 5 | 0 |
| 40 | Televisi | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Sound System | 2 | 2 | 0 |
| 42 | Dispenser | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Mimbar/Podium | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Karpet | 3 | 3 | 0 |
| 45 | Gordyin/Kray | 5 | 5 | 0 |
| 46 | Mesin Pompa Air | 2 | 2 | 0 |
| 47 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Meja Tamu Biasa | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 5 | 5 | 0 |
| 52 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Camera Electronic | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Layar Film/Projector | 2 | 1 | 1 |
| 55 | Wireless Amplifier | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Antene SHF Portable | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Termometer Mercury Untuk Suhu Badan | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Lap Top | 10 | 9 | 1 |
| 59 | Note Book | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 1 | 1 | 0 |
| 61 | External/ Portable Hardisk | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Hard disk Eksternal | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Monitor | 1 | 0 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Lain-lain Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Jam Elektronik | 6 | 0 | 6 |
| 70 | Gambar Presiden | 4 | 0 | 4 |
| 71 | Facsimile | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Bibliografi, Katalog | 0 | 0 | 0 |

***Sumber Data : Kecamatan Krejengan***

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Krejengan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Krejengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Krejengan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Krejengan dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang**

**Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

Target dan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 90,70 | 87,85 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 87,85 | 99,00 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 95,00 | 100 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 100,00 | 99,00 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 86,91 | 96,15 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 86,91 | 96,15 | 97,00 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | | | 0 | 0 | 94,05 | 0,00 | 0,00 | - | - | 94,05 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 | | | 71,51 | 71,56 | 72,31 | 0,00 | 0,00 | 89,39 | 89,45 | 97,72 |

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | - | **2.169.875.162,00** | **2.171.832.014,00** | - | - | - | **2.197.165.267,00** | **1.989.586.959,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **101,26** | **91,61** | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | - | 15.104.000,00 | 12.000.000,00 | - | - | - | 13.370.000,00 | 12.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 88,52 | 100,00 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | | 6.400.000,00 | 4.000.000,00 | | | | 6.400.000,00 | 4.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | - | | 4.000.000,00 | | | - | | 4.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | - | - | - | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | - | 8.704.000,00 | 4.000.000,00 | | | - | 6.970.000,00 | 4.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 80,08 | 100,00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | - | - | - | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | - | - | - | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | - | - | - | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | - | 1.833.498.398,00 | 1.759.860.048,00 | - | - | - | 1.834.721.077,00 | 1.627.782.238,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,07 | 92,49 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 1.833.498.398,00 | 1.755.860.048,00 | - | | | 1.736.052.125,00 | 1.609.482.238,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 94,69 | 91,66 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | | | | - | - | | 97.504.952,00 | 14.300.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | | | - | - | - | - | 464.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | | - | 4.000.000,00 | - | - | - | - | 4.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | | | - | - | - | - | 700.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 66.694.764,00 | 136.492.700,00 | - | - | - | 108.054.280,00 | 116.881.451,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 162,01 | 85,63 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | | | | 13.400.000,00 | - | - | | 1.800.000,00 | 13.400.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | | 27.287.700,00 | 20.048.700,00 | - | - | | 35.609.000,00 | 20.045.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 130,49 | 99,98 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | | 13.470.800,00 | 17.950.000,00 | - | - | | 1.802.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13,38 | 0,00 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | | | 22.500.000,00 | 23.940.000,00 | - | - | | 16.231.000,00 | 22.433.265,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 72,14 | 93,71 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | - | | 3.436.264,00 | 4.984.000,00 | - | - | - | 3.400.000,00 | 4.984.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,94 | 100,00 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | | | - | - | - | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | | | 56.170.000,00 | - | - | | 49.212.280,00 | 56.019.186,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,73 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 240.178.000,00 | 208.461.663,00 | - | - | - | 227.496.610,00 | 182.023.970,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 94,72 | 87,32 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | | | - | - | - | | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | | 53.862.200,00 | 61.718.300,00 | | - | | 47.590.546,00 | 42.243.774,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 88,36 | 68,45 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | | 4.028.900,00 | 3.759.675,00 | | - | | 3.150.000,00 | 5.715.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 78,19 | 152,01 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | | | 182.286.900,00 | 142.983.688,00 | | - | | 176.756.064,00 | 134.065.196,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 96,97 | 93,76 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 14.400.000,00 | 55.017.603,00 | - | - | - | 13.523.300,00 | 50.899.300,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,91 | 92,51 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | | | 14.400.000,00 | 21.000.000,00 | | - | | 13.523.300,00 | 20.999.300,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,91 | 100,00 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | - | | 34.017.603,00 | | - | - | | 29.900.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 87,90 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | **-** | **53.168.300,00** | **66.900.000,00** | **-** | **-** | **#######** | **38.575.000,00** | **63.890.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **72,55** | **95,50** | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | - | 34.059.800,00 | 41.700.000,00 | - | - | ####### | 21.605.000,00 | 40.690.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 63,43 | 97,58 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | | | 34.059.800,00 | 41.700.000,00 | - | - | ####### | 21.605.000,00 | 40.690.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 63,43 | 97,58 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | - | - | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | - | 19.108.500,00 | 25.200.000,00 | - | - | - | 16.970.000,00 | 23.200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 88,81 | 92,06 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | - | | | 19.108.500,00 | 25.200.000,00 | - | - | - | 16.970.000,00 | 23.200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 88,81 | 92,06 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | - | | - | | - | - | - | - | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | **-** | **295.939.900,00** | **57.800.000,00** | **-** | **-** | **-** | **284.564.900,00** | **50.780.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **96,16** | **87,85** | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | - | 245.939.900,00 | 32.000.000,00 | - | - | - | 237.139.900,00 | 28.480.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 96,42 | 89,00 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | | 8.789.900,00 | 20.000.000,00 | - | - | | 8.789.900,00 | 18.480.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 92,40 | | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | | | 237.150.000,00 | 12.000.000,00 | - | - | | 228.350.000,00 | 10.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 96,29 | 83,33 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 47.425.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 94,85 | #DIV/0! | | |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 47.425.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 94,85 | #DIV/0! | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | 25.800.000,00 | - | - | - | - | 22.300.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 86,43 | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | - | 25.800.000,00 | - | - | - | - | 22.300.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 86,43 | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | **-** | **40.270.200,00** | **67.256.000,00** | **-** | **-** | **-** | **38.451.000,00** | **67.237.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **95,48** | **99,97** | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | - | 40.270.200,00 | 67.256.000,00 | - | - | - | 38.451.000,00 | 67.237.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95,48 | 99,97 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | | | 32.270.200,00 | 62.256.000,00 | - | - | | 30.451.000,00 | 62.237.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 94,36 | 99,97 | | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | - | 8.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | - | 8.000.000,00 | 5.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | **-** | **30.925.500,00** | **60.035.000,00** | **-** | **-** | **-** | **30.200.000,00** | **58.416.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **97,65** | **97,30** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | - | 30.925.500,00 | 60.035.000,00 | - | - | - | 30.200.000,00 | 58.416.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,65 | 97,30 | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | | | 30.925.500,00 | 60.035.000,00 | - | - | | 30.200.000,00 | 58.416.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,65 | 97,30 | | |
| **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | **2.590.179.062,00** | **2.423.823.014,00** | **-** | **-** | **#######** | **2.588.956.167,00** | **2.229.909.959,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **99,95** | **92,00** | | |

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah Kecamatan Krejengan :

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Krejengan

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan :

- **Keterbatasan Sumber Daya** : Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur** : Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.
- **Birokrasi yang Kaku** : Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.

- **Akses dan Kesenjangan Digital** : Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah** : Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital** : Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar-Sektor** : Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur** : Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu** : Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat** : Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Krejengan

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Krejengan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

**Tabel 2.6**

**Isu Strategis Kecamatan Krejengan**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti kawasan pegunungan | Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br><br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br><br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, serta kehutanan | Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

***Sumber Data : Kecamatan Krejengan***

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Krejengan Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Krejengan Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Krejengan, dalam hal ini Kecamatan Krejengan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang

tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Krejengan Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

**Gambar 3.1**

**Konsep Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo**

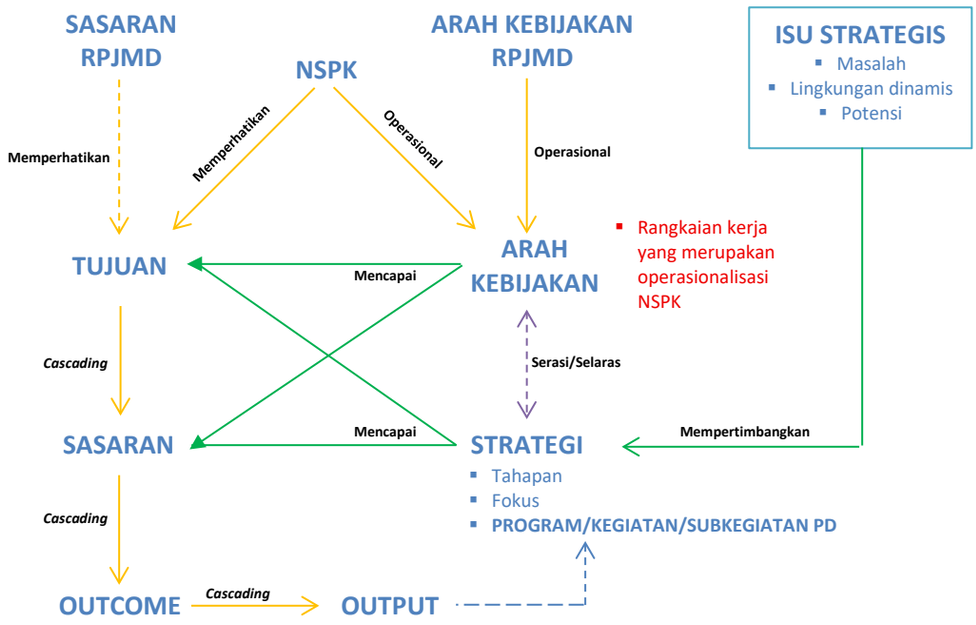


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan

Krejengan Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.2**

**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**

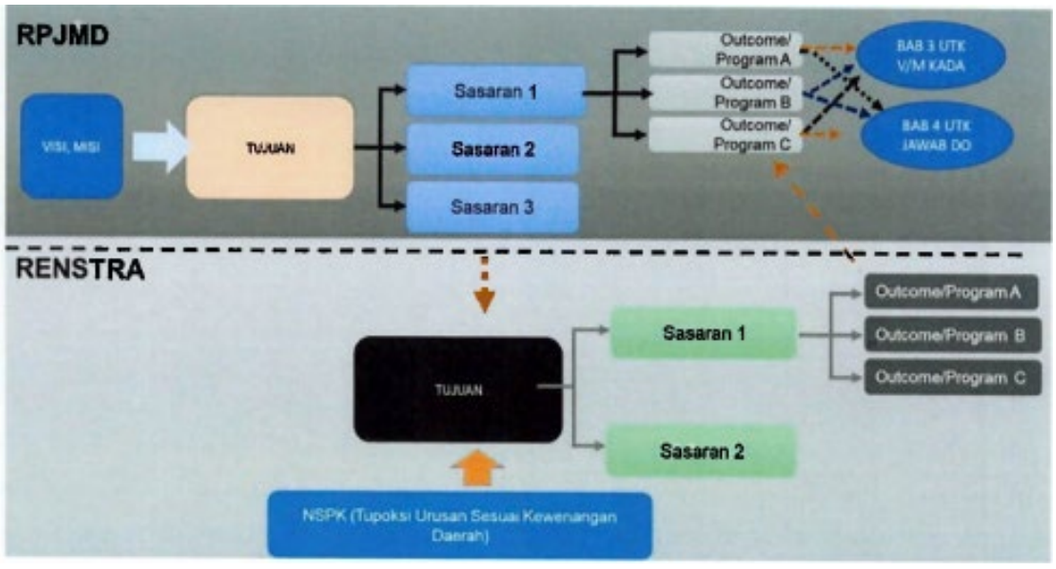


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.1**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Krejengan**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Krejengan** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 85,13 | 85,98 | 86,84 | 87,71 | 88,59 | 89,47 | 90,37 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, diperlukan Misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Krejengan

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

**Tabel 3.1.2**

**Definisi Operasional IKU Kecamatan Krejengan**

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut :<br>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | |
| 3. | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai hasil atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1) ——————————— X 100<br>Nilai LHE AKIP tahun (n-1)<br><br>Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Krejengan***

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Krejengan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Krejengan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis

data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

## B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Krejengan

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Krejengan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Kecamatan Krejengan**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

***Sumber Data : Kecamatan Krejengan***

## C. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Krejengan

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Krejengan sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Krejengan :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Krejengan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Krejengan, sebagai berikut

**Tabel 3.3**

**Arah Kebijakan Kecamatan Krejengan**

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul; | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

***Sumber Data : Kecamatan Krejengan***

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat

melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

## Tabel 4.1

## Program Kecamatan Krejengan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.803.402.291,29 | | 2.834.557.359,07 | | 2.876.801.364,95 | | 2.935.500.994,17 | | 3.004.335.269,51 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.604.283.891,29 | | 2.633.226.095,33 | | 2.672.469.618,94 | | 2.726.999.965,63 | | 2.790.945.120,76 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,31 | 73,03 | 2.604.283.891,29 | 73,4 | 2.633.226.095,33 | 73,77 | 2.672.469.618,94 | 74,14 | 2.726.999.965,63 | 74,51 | 2.790.945.120,76 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3.410.000 | | 3.751.000 | | 4.126.100 | | 4.538.710 | | 4.992.581 | | |
| tercapainya Laporan Capaian Kinerja yang tertib dan tepat waktu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 8 | 1.100.000 | 8 | 1.210.000 | 8 | 1.331.000 | 8 | 1.464.100 | 8 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1.100.000 | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 8 | 1.100.000 | 8 | 1.210.000 | 8 | 1.331.000 | 8 | 1.464.100 | 8 | 1.610.510 | | |
| Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, PPRG | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | | |
| terwujudnya Dokumen Monev yang tertib dan tepat waktu | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 20 | 1.100.000 | 20 | 1.210.000 | 20 | 1.331.000 | 20 | 1.464.100 | 20 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.100.000 | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 20 | 1.100.000 | 20 | 1.210.000 | 20 | 1.331.000 | 20 | 1.464.100 | 20 | 1.610.510 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| terwujudnya Dokumen RKA yang tertib dan tepat waktu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 8 | 1.210.000 | 8 | 1.331.000 | 8 | 1.464.100 | 8 | 1.610.510 | 8 | 1.771.561 | | |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | 1.771.561 | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 8 | 1.210.000 | 8 | 1.331.000 | 8 | 1.464.100 | 8 | 1.610.510 | 8 | 1.771.561 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.231.749.752,29 | | 2.223.438.542,33 | | 2.221.703.310,94 | | 2.231.157.026,63 | | 2.245.517.887,76 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 48 | 4.400.000 | 48 | 4.840.000 | 48 | 5.324.000 | 48 | 5.856.400 | 48 | 6.442.040 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 4.400.000 | | 4.840.000 | | 5.324.000 | | 5.856.400 | | 6.442.040 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 48 | 4.400.000 | 48 | 4.840.000 | 48 | 5.324.000 | 48 | 5.856.400 | 48 | 6.442.040 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 14 | 2.216.249.752,29 | 14 | 2.207.388.542,33 | 14 | 2.205.048.310,94 | 14 | 2.213.836.526,63 | 14 | 2.227.465.337,76 | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.216.249.752,29 | | 2.207.388.542,33 | | 2.205.048.310,94 | | 2.213.836.526,63 | | 2.227.465.337,76 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 14 | 2.216.249.752,29 | 14 | 2.207.388.542,33 | 14 | 2.205.048.310,94 | 14 | 2.213.836.526,63 | 14 | 2.227.465.337,76 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| terpenuhinya laporan keuang akhir tahun tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 7 | 1.100.000 | 7 | 1.210.000 | 7 | 1.331.000 | 7 | 1.464.100 | 7 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1.100.000 | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 7 | 1.100.000 | 7 | 1.210.000 | 7 | 1.331.000 | 7 | 1.464.100 | 7 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 62.156.781 | | 68.372.460 | | 75.209.705 | | 82.730.676 | | 91.003.743 | | |
| terpenuhinya laporan belanja ATK | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| terpenuhinya laporan belanja BBM | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 26.511.200 | 12 | 29.162.320 | 12 | 32.078.552 | 12 | 35.286.407 | 12 | 38.815.047 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 26.511.200 | | 29.162.320 | | 32.078.552 | | 35.286.407 | | 38.815.047 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 26.511.200 | 12 | 29.162.320 | 12 | 32.078.552 | 12 | 35.286.407 | 12 | 38.815.047 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| terpenuhinya laporan belanja Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 19.154.740 | 4 | 21.070.214 | 4 | 23.177.235 | 4 | 25.494.959 | 4 | 28.044.455 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 19.154.740 | | 21.070.214 | | 23.177.235 | | 25.494.959 | | 28.044.455 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 19.154.740 | 4 | 21.070.214 | 4 | 23.177.235 | 4 | 25.494.959 | 4 | 28.044.455 | | |
| terpenuhinya laporan kegiatan koordinasi dan konsulatsi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 8.315.641 | 12 | 9.147.206 | 12 | 10.061.926 | 12 | 11.068.119 | 12 | 12.174.931 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.315.641 | | 9.147.206 | | 10.061.926 | | 11.068.119 | | 12.174.931 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 8.315.641 | 12 | 9.147.206 | 12 | 10.061.926 | 12 | 11.068.119 | 12 | 12.174.931 | | |
| Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| tertibnya administrasi umum PD tepat waktu | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 8.175.200 | 12 | 8.992.720 | 12 | 9.891.992 | 12 | 10.881.191 | 12 | 11.969.310 | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.175.200 | | 8.992.720 | | 9.891.992 | | 10.881.191 | | 11.969.310 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 8.175.200 | 12 | 8.992.720 | 12 | 9.891.992 | 12 | 10.881.191 | 12 | 11.969.310 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 66.419.100 | | 73.061.010 | | 80.367.111 | | 88.403.822 | | 97.244.204 | | |
| Tersedianya Paket Pengadaan Gedung dan bangunan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Paket Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 50 | 31.350.000 | 5 | 34.485.000 | 5 | 37.933.500 | 5 | 41.726.850 | 5 | 45.899.535 | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 31.350.000 | | 34.485.000 | | 37.933.500 | | 41.726.850 | | 45.899.535 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 50 | 31.350.000 | 5 | 34.485.000 | 5 | 37.933.500 | 5 | 41.726.850 | 5 | 45.899.535 | | |
| Tersedianya Paket Pengadaan Peralatan dan mesin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 5 | 35.069.100 | 5 | 38.576.010 | 5 | 42.433.611 | 5 | 46.676.972 | 5 | 51.344.669 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 35.069.100 | | 38.576.010 | | 42.433.611 | | 46.676.972 | | 51.344.669 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 5 | 35.069.100 | 5 | 38.576.010 | 5 | 42.433.611 | 5 | 46.676.972 | 5 | 51.344.669 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 175.203.858 | | 192.724.244 | | 211.996.668 | | 233.196.335 | | 256.515.969 | | |
| terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| terpenuhinya jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 0 | 12 | 13.462.900 | 12 | 14.809.190 | 12 | 16.290.109 | 12 | 17.919.120 | 12 | 19.711.032 | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 13.462.900 | | 14.809.190 | | 16.290.109 | | 17.919.120 | | 19.711.032 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 0 | 12 | 13.462.900 | 12 | 14.809.190 | 12 | 16.290.109 | 12 | 17.919.120 | 12 | 19.711.032 | | |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SIRUP setiap bulan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 124.479.668 | 12 | 136.927.635 | 12 | 150.620.398 | 12 | 165.682.438 | 12 | 182.250.682 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 124.479.668 | | 136.927.635 | | 150.620.398 | | 165.682.438 | | 182.250.682 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 124.479.668 | 12 | 136.927.635 | 12 | 150.620.398 | 12 | 165.682.438 | 12 | 182.250.682 | | |
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 37.261.290 | 12 | 40.987.419 | 12 | 45.086.161 | 12 | 49.594.777 | 12 | 54.554.255 | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 37.261.290 | | 40.987.419 | | 45.086.161 | | 49.594.777 | | 54.554.255 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 37.261.290 | 12 | 40.987.419 | 12 | 45.086.161 | 12 | 49.594.777 | 12 | 54.554.255 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 65.344.400 | | 71.878.839 | | 79.066.724 | | 86.973.396 | | 95.670.736 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 8 | 26.400.000 | 8 | 29.040.000 | 8 | 31.944.000 | 8 | 35.138.400 | 8 | 38.652.240 | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 26.400.000 | | 29.040.000 | | 31.944.000 | | 35.138.400 | | 38.652.240 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 8 | 26.400.000 | 8 | 29.040.000 | 8 | 31.944.000 | 8 | 35.138.400 | 8 | 38.652.240 | | |
| Tersedianya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 17 | 17 | 10.406.000 | 17 | 11.446.600 | 17 | 12.591.260 | 17 | 13.850.386 | 17 | 15.235.425 | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.406.000 | | 11.446.600 | | 12.591.260 | | 13.850.386 | | 15.235.425 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 17 | 17 | 10.406.000 | 17 | 11.446.600 | 17 | 12.591.260 | 17 | 13.850.386 | 17 | 15.235.425 | | |
| Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2 | 28.538.400 | 2 | 31.392.239 | 2 | 34.531.464 | 2 | 37.984.610 | 2 | 41.783.071 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 28.538.400 | | 31.392.239 | | 34.531.464 | | 37.984.610 | | 41.783.071 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2 | 28.538.400 | 2 | 31.392.239 | 2 | 34.531.464 | 2 | 37.984.610 | 2 | 41.783.071 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 12.400.000 | | 12.537.805 | | 12.724.658,55 | | 12.984.298,56 | | 13.288.766,1 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 12.400.000 | 100 | 12.537.805 | 100 | 12.724.658,55 | 100 | 12.984.298,56 | 100 | 13.288.766,1 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 6.200.000 | | 6.268.900 | | 6.362.000 | | 6.492.149,28 | | 6.644.383,05 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik selama satu tahun | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 9 | 9 | 6.200.000 | 9 | 6.268.900 | 9 | 6.362.000 | 9 | 6.492.149,28 | 9 | 6.644.383,05 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 6.200.000 | | 6.268.900 | | 6.362.000 | | 6.492.149,28 | | 6.644.383,05 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 9 | 9 | 6.200.000 | 9 | 6.268.900 | 9 | 6.362.000 | 9 | 6.492.149,28 | 9 | 6.644.383,05 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 6.200.000 | | 6.268.905 | | 6.362.658,55 | | 6.492.149,28 | | 6.644.383,05 | | |
| Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | 6.200.000 | 6 | 6.268.905 | 6 | 6.362.658,55 | 6 | 6.492.149,28 | 6 | 6.644.383,05 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 6.200.000 | | 6.268.905 | | 6.362.658,55 | | 6.492.149,28 | | 6.644.383,05 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | 6.200.000 | 6 | 6.268.905 | 6 | 6.362.658,55 | 6 | 6.492.149,28 | 6 | 6.644.383,05 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 42.000.000 | | 42.466.758,86 | | 43.099.649,92 | | 43.979.075,76 | | 45.010.336,8 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 42.000.000 | 100 | 42.466.758,86 | 100 | 43.099.649,92 | 100 | 43.979.075,76 | 100 | 45.010.336,8 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 21.000.000 | | 21.233.379,44 | | 21.549.824 | | 21.989.536 | | 0 | | |
| Meningkatnya taraf hidup pekonomian masyarakat di tingkat desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 3 | 3 | 21.000.000 | 3 | 21.233.379,44 | 3 | 21.549.824 | 3 | 21.989.536 | 3 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 10.500.000 | | 10.616.689,72 | | 10.774.912 | | 10.994.768 | | 0 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 8 | 8 | 10.500.000 | 8 | 10.616.689,72 | 8 | 10.774.912 | 8 | 10.994.768 | 8 | 0 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 10.500.000 | | 10.616.689,72 | | 10.774.912 | | 10.994.768 | | 0 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 3 | 3 | 10.500.000 | 3 | 10.616.689,72 | 3 | 10.774.912 | 3 | 10.994.768 | 3 | 0 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 21.000.000 | | 21.233.379,42 | | 21.549.825,92 | | 21.989.539,76 | | 45.010.336,8 | | |
| Meningkatnya kesejahteraan keluarga baik secara kesehatan, sosial, dan lingkungan di tingkat pedesaan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 350 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.233.379,42 | 350 | 21.549.825,92 | 350 | 21.989.539,76 | 350 | 45.010.336,8 | | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 350 | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 10.500.000 | | 10.616.689,72 | | 10.774.912 | | 10.994.768 | | 0 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 350 | 350 | 10.500.000 | 350 | 10.616.689,72 | 350 | 10.774.912 | 350 | 10.994.768 | 350 | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 10.500.000 | | 10.616.689,7 | | 10.774.913,92 | | 10.994.771,76 | | 45.010.336,8 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 350 | 350 | 10.500.000 | 350 | 10.616.689,7 | 350 | 10.774.913,92 | 350 | 10.994.771,76 | 350 | 45.010.336,8 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 49.618.400 | | 50.169.824,47 | | 50.917.515,94 | | 51.956.461,25 | | 53.174.783,23 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 49.618.400 | 100 | 50.169.824,47 | 100 | 50.917.515,94 | 100 | 51.956.461,25 | 100 | 53.174.783,23 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 49.618.400 | | 50.169.824,47 | | 50.917.515,94 | | 51.956.461,25 | | 53.174.783,23 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 14 | 14 | 49.618.400 | 14 | 50.169.824,47 | 14 | 50.917.515,94 | 14 | 51.956.461,25 | 14 | 53.174.783,23 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 49.618.400 | | 50.169.824,47 | | 50.917.515,94 | | 51.956.461,25 | | 53.174.783,23 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 14 | 14 | 49.618.400 | 14 | 50.169.824,47 | 14 | 50.917.515,94 | 14 | 51.956.461,25 | 14 | 53.174.783,23 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 85.100.000 | | 86.045.742,35 | | 87.328.100,19 | | 89.109.984,46 | | 91.199.515,76 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 85.100.000 | 100 | 86.045.742,35 | 100 | 87.328.100,19 | 100 | 89.109.984,46 | 100 | 91.199.515,76 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 85.100.000 | | 86.045.742,35 | | 87.328.100,19 | | 89.109.984,46 | | 91.199.515,76 | | |
| Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.605 | 1.605 | 85.100.000 | 1.605 | 86.045.742,35 | 1.605 | 87.328.100,19 | 1.605 | 89.109.984,46 | 1.605 | 91.199.515,76 | | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT** | **INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT** | **BASELINE TAHUN 2024** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |
| | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | | |

| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 85.100.000 | | 86.045.742,35 | | 87.328.100,19 | | 89.109.984,46 | | 91.199.515,76 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.605 | 1.605 | 85.100.000 | 1.605 | 86.045.742,35 | 1.605 | 87.328.100,19 | 1.605 | 89.109.984,46 | 1.605 | 91.199.515,76 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 10.000.000 | | 10.111.133,06 | | 10.261.821,41 | | 10.471.208,51 | | 10.716.746,86 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.111.133,06 | 100 | 10.261.821,41 | 100 | 10.471.208,51 | 100 | 10.716.746,86 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 10.000.000 | | 10.111.133,06 | | 10.261.821,41 | | 10.471.208,51 | | 10.716.746,86 | | |
| Terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang bersih dan baik | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.111.133,06 | 2 | 10.261.821,41 | 2 | 10.471.208,51 | 2 | 10.716.746,86 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | 5.000.000 | | 5.055.566,53 | | 5.130.910 | | 5.235.600 | | 5.358.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.055.566,53 | 2 | 5.130.910 | 2 | 5.235.600 | 2 | 5.358.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 5.000.000 | | 5.055.566,53 | | 5.130.911,41 | | 5.235.608,51 | | 5.358.746,86 | | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.055.566,53 | 2 | 5.130.911,41 | 2 | 5.235.608,51 | 2 | 5.358.746,86 | | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 4.1**

**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krejengan**

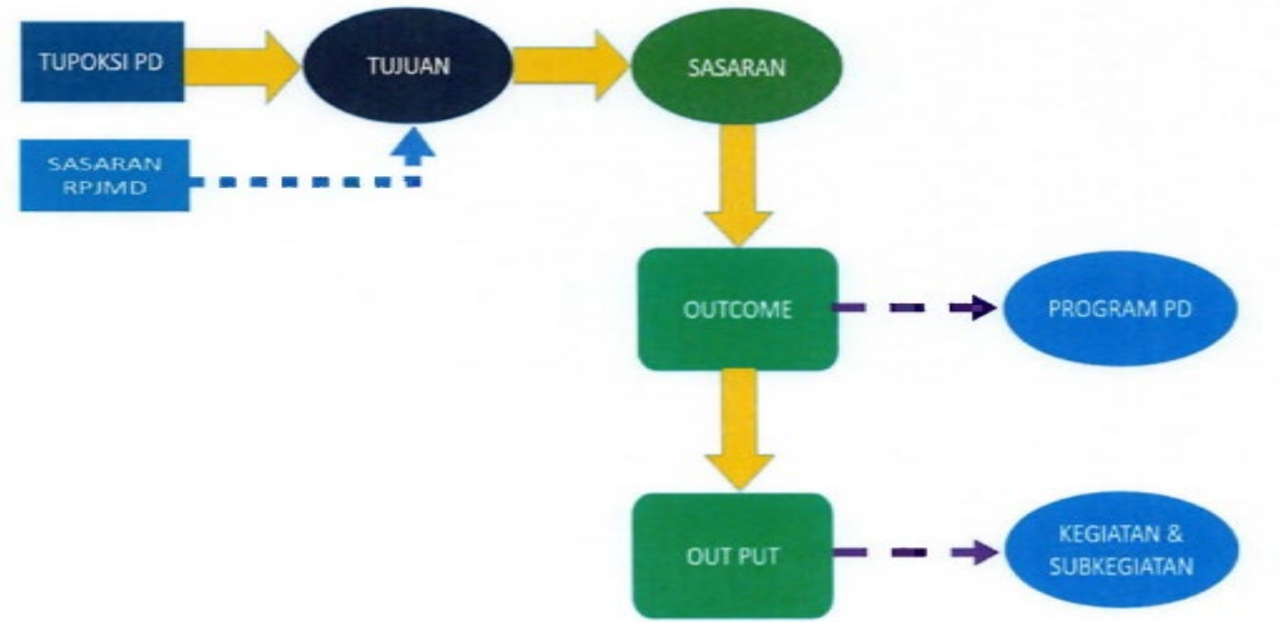


**Tabel 4.2**

**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Krejengan**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Daerah | | | | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, PPRG | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | terwujudnya Dokumen RKA yang tertib dan tepat waktu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | terwujudnya Dokumen Monev yang tertib dan tepat waktu | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | tercapainya Laporan Capaian Kinerja yang tertib dan tepat waktu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | terpenuhinya laporan keuang akhir tahun tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | tertibnya administrasi umum PD tepat waktu | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | terpenuhinya laporan belanja ATK | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | terpenuhinya laporan belanja Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | terpenuhinya laporan belanja BBM | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | terpenuhinya laporan kegiatan koordinasi dan konsulatsi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Tersedianya Paket Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | Tersedianya Paket Pengadaan Peralatan dan mesin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Tersedianya Paket Pengadaan Gedung dan bangunan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | terpenuhinya jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SIRUP setiap bulan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | Tersedianya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik selama satu tahun | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | Meningkatnya taraf hidup pekonomian masyarakat di tingkat desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | Meningkatnya kesejahteraan keluarga baik secara kesehatan, sosial, dan lingkungan di tingkat pedesaan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang bersih dan baik | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2.1**

**Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Krejengan**

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Krejengan***

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Krejengan**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.803.402.291,29 | | 2.834.557.359,07 | | 2.876.801.364,95 | | 2.935.500.994,17 | | 3.004.335.269,51 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.604.283.891,29 | | 2.633.226.095,33 | | 2.672.469.618,94 | | 2.726.999.965,63 | | 2.790.945.120,76 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,31 | 73,03 | 2.604.283.891,29 | 73,4 | 2.633.226.095,33 | 73,77 | 2.672.469.618,94 | 74,14 | 2.726.999.965,63 | 74,51 | 2.790.945.120,76 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3.410.000 | | 3.751.000 | | 4.126.100 | | 4.538.710 | | 4.992.581 | | |
| tercapainya Laporan Capaian Kinerja yang tertib dan tepat waktu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 8 | 1.100.000 | 8 | 1.210.000 | 8 | 1.331.000 | 8 | 1.464.100 | 8 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1.100.000 | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 8 | 1.100.000 | 8 | 1.210.000 | 8 | 1.331.000 | 8 | 1.464.100 | 8 | 1.610.510 | | |
| Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, PPRG | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | | |
| terwujudnya Dokumen Monev yang tertib dan tepat waktu | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 20 | 1.100.000 | 20 | 1.210.000 | 20 | 1.331.000 | 20 | 1.464.100 | 20 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.100.000 | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 20 | 1.100.000 | 20 | 1.210.000 | 20 | 1.331.000 | 20 | 1.464.100 | 20 | 1.610.510 | | |
| terwujudnya Dokumen RKA yang tertib dan tepat waktu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 8 | 1.210.000 | 8 | 1.331.000 | 8 | 1.464.100 | 8 | 1.610.510 | 8 | 1.771.561 | | |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | 1.771.561 | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 8 | 1.210.000 | 8 | 1.331.000 | 8 | 1.464.100 | 8 | 1.610.510 | 8 | 1.771.561 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.231.749.752,29 | | 2.223.438.542,33 | | 2.221.703.310,94 | | 2.231.157.026,63 | | 2.245.517.887,76 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 48 | 4.400.000 | 48 | 4.840.000 | 48 | 5.324.000 | 48 | 5.856.400 | 48 | 6.442.040 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 4.400.000 | | 4.840.000 | | 5.324.000 | | 5.856.400 | | 6.442.040 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 48 | 4.400.000 | 48 | 4.840.000 | 48 | 5.324.000 | 48 | 5.856.400 | 48 | 6.442.040 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 14 | 2.216.249.752,29 | 14 | 2.207.388.542,33 | 14 | 2.205.048.310,94 | 14 | 2.213.836.526,63 | 14 | 2.227.465.337,76 | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.216.249.752,29 | | 2.207.388.542,33 | | 2.205.048.310,94 | | 2.213.836.526,63 | | 2.227.465.337,76 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 14 | 2.216.249.752,29 | 14 | 2.207.388.542,33 | 14 | 2.205.048.310,94 | 14 | 2.213.836.526,63 | 14 | 2.227.465.337,76 | | |
| terpenuhinya laporan keuang akhir tahun tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 7 | 1.100.000 | 7 | 1.210.000 | 7 | 1.331.000 | 7 | 1.464.100 | 7 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1.100.000 | | 1.210.000 | | 1.331.000 | | 1.464.100 | | 1.610.510 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 7 | 1.100.000 | 7 | 1.210.000 | 7 | 1.331.000 | 7 | 1.464.100 | 7 | 1.610.510 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 62.156.781 | | 68.372.460 | | 75.209.705 | | 82.730.676 | | 91.003.743 | | |
| terpenuhinya laporan belanja ATK | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| terpenuhinya laporan belanja BBM | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 26.511.200 | 12 | 29.162.320 | 12 | 32.078.552 | 12 | 35.286.407 | 12 | 38.815.047 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 26.511.200 | | 29.162.320 | | 32.078.552 | | 35.286.407 | | 38.815.047 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 26.511.200 | 12 | 29.162.320 | 12 | 32.078.552 | 12 | 35.286.407 | 12 | 38.815.047 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| terpenuhinya laporan belanja Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 19.154.740 | 4 | 21.070.214 | 4 | 23.177.235 | 4 | 25.494.959 | 4 | 28.044.455 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 19.154.740 | | 21.070.214 | | 23.177.235 | | 25.494.959 | | 28.044.455 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 19.154.740 | 4 | 21.070.214 | 4 | 23.177.235 | 4 | 25.494.959 | 4 | 28.044.455 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| terpenuhinya laporan kegiatan koordinasi dan konsulatsi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 8.315.641 | 12 | 9.147.206 | 12 | 10.061.926 | 12 | 11.068.119 | 12 | 12.174.931 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.315.641 | | 9.147.206 | | 10.061.926 | | 11.068.119 | | 12.174.931 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 8.315.641 | 12 | 9.147.206 | 12 | 10.061.926 | 12 | 11.068.119 | 12 | 12.174.931 | | |
| Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| tertibnya administrasi umum PD tepat waktu | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 8.175.200 | 12 | 8.992.720 | 12 | 9.891.992 | 12 | 10.881.191 | 12 | 11.969.310 | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.175.200 | | 8.992.720 | | 9.891.992 | | 10.881.191 | | 11.969.310 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 8.175.200 | 12 | 8.992.720 | 12 | 9.891.992 | 12 | 10.881.191 | 12 | 11.969.310 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 66.419.100 | | 73.061.010 | | 80.367.111 | | 88.403.822 | | 97.244.204 | | |
| Tersedianya Paket Pengadaan Gedung dan bangunan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| Tersedianya Paket Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 50 | 31.350.000 | 5 | 34.485.000 | 5 | 37.933.500 | 5 | 41.726.850 | 5 | 45.899.535 | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 31.350.000 | | 34.485.000 | | 37.933.500 | | 41.726.850 | | 45.899.535 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 50 | 31.350.000 | 5 | 34.485.000 | 5 | 37.933.500 | 5 | 41.726.850 | 5 | 45.899.535 | | |
| Tersedianya Paket Pengadaan Peralatan dan mesin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 5 | 35.069.100 | 5 | 38.576.010 | 5 | 42.433.611 | 5 | 46.676.972 | 5 | 51.344.669 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 35.069.100 | | 38.576.010 | | 42.433.611 | | 46.676.972 | | 51.344.669 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 5 | 35.069.100 | 5 | 38.576.010 | 5 | 42.433.611 | 5 | 46.676.972 | 5 | 51.344.669 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 175.203.858 | | 192.724.244 | | 211.996.668 | | 233.196.335 | | 256.515.969 | | |
| terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| terpenuhinya jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 0 | 12 | 13.462.900 | 12 | 14.809.190 | 12 | 16.290.109 | 12 | 17.919.120 | 12 | 19.711.032 | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 13.462.900 | | 14.809.190 | | 16.290.109 | | 17.919.120 | | 19.711.032 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 0 | 12 | 13.462.900 | 12 | 14.809.190 | 12 | 16.290.109 | 12 | 17.919.120 | 12 | 19.711.032 | | |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SIRUP setiap bulan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 124.479.668 | 12 | 136.927.635 | 12 | 150.620.398 | 12 | 165.682.438 | 12 | 182.250.682 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 124.479.668 | | 136.927.635 | | 150.620.398 | | 165.682.438 | | 182.250.682 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 124.479.668 | 12 | 136.927.635 | 12 | 150.620.398 | 12 | 165.682.438 | 12 | 182.250.682 | | |
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 37.261.290 | 12 | 40.987.419 | 12 | 45.086.161 | 12 | 49.594.777 | 12 | 54.554.255 | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, | | | | 37.261.290 | | 40.987.419 | | 45.086.161 | | 49.594.777 | | 54.554.255 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 37.261.290 | 12 | 40.987.419 | 12 | 45.086.161 | 12 | 49.594.777 | 12 | 54.554.255 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 65.344.400 | | 71.878.839 | | 79.066.724 | | 86.973.396 | | 95.670.736 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 8 | 26.400.000 | 8 | 29.040.000 | 8 | 31.944.000 | 8 | 35.138.400 | 8 | 38.652.240 | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 26.400.000 | | 29.040.000 | | 31.944.000 | | 35.138.400 | | 38.652.240 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 8 | 26.400.000 | 8 | 29.040.000 | 8 | 31.944.000 | 8 | 35.138.400 | 8 | 38.652.240 | | |
| Tersedianya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 17 | 17 | 10.406.000 | 17 | 11.446.600 | 17 | 12.591.260 | 17 | 13.850.386 | 17 | 15.235.425 | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.406.000 | | 11.446.600 | | 12.591.260 | | 13.850.386 | | 15.235.425 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 17 | 17 | 10.406.000 | 17 | 11.446.600 | 17 | 12.591.260 | 17 | 13.850.386 | 17 | 15.235.425 | | |
| Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2 | 28.538.400 | 2 | 31.392.239 | 2 | 34.531.464 | 2 | 37.984.610 | 2 | 41.783.071 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 28.538.400 | | 31.392.239 | | 34.531.464 | | 37.984.610 | | 41.783.071 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2 | 28.538.400 | 2 | 31.392.239 | 2 | 34.531.464 | 2 | 37.984.610 | 2 | 41.783.071 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 12.400.000 | | 12.537.805 | | 12.724.658,55 | | 12.984.298,56 | | 13.288.766,1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 12.400.000 | 100 | 12.537.805 | 100 | 12.724.658,55 | 100 | 12.984.298,56 | 100 | 13.288.766,1 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 6.200.000 | | 6.268.900 | | 6.362.000 | | 6.492.149,28 | | 6.644.383,05 | | |
| Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik selama satu tahun | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 9 | 9 | 6.200.000 | 9 | 6.268.900 | 9 | 6.362.000 | 9 | 6.492.149,28 | 9 | 6.644.383,05 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 6.200.000 | | 6.268.900 | | 6.362.000 | | 6.492.149,28 | | 6.644.383,05 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 9 | 9 | 6.200.000 | 9 | 6.268.900 | 9 | 6.362.000 | 9 | 6.492.149,28 | 9 | 6.644.383,05 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 6.200.000 | | 6.268.905 | | 6.362.658,55 | | 6.492.149,28 | | 6.644.383,05 | | |
| Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | 6.200.000 | 6 | 6.268.905 | 6 | 6.362.658,55 | 6 | 6.492.149,28 | 6 | 6.644.383,05 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 6.200.000 | | 6.268.905 | | 6.362.658,55 | | 6.492.149,28 | | 6.644.383,05 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | 6.200.000 | 6 | 6.268.905 | 6 | 6.362.658,55 | 6 | 6.492.149,28 | 6 | 6.644.383,05 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 42.000.000 | | 42.466.758,86 | | 43.099.649,92 | | 43.979.075,76 | | 45.010.336,8 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 42.000.000 | 100 | 42.466.758,86 | 100 | 43.099.649,92 | 100 | 43.979.075,76 | 100 | 45.010.336,8 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 21.000.000 | | 21.233.379,44 | | 21.549.824 | | 21.989.536 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya taraf hidup pekonomian masyarakat di tingkat desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 3 | 3 | 21.000.000 | 3 | 21.233.379,44 | 3 | 21.549.824 | 3 | 21.989.536 | 3 | 0 | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 10.500.000 | | 10.616.689,72 | | 10.774.912 | | 10.994.768 | | 0 | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 8 | 8 | 10.500.000 | 8 | 10.616.689,72 | 8 | 10.774.912 | 8 | 10.994.768 | 8 | 0 | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 10.500.000 | | 10.616.689,72 | | 10.774.912 | | 10.994.768 | | 0 | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 3 | 3 | 10.500.000 | 3 | 10.616.689,72 | 3 | 10.774.912 | 3 | 10.994.768 | 3 | 0 | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 21.000.000 | | 21.233.379,42 | | 21.549.825,92 | | 21.989.539,76 | | 45.010.336,8 | |
| Meningkatnya kesejahteraan keluarga baik secara kesehatan, sosial, dan lingkungan di tingkat pedesaan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 350 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.233.379,42 | 350 | 21.549.825,92 | 350 | 21.989.539,76 | 350 | 45.010.336,8 | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 350 | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 10.500.000 | | 10.616.689,72 | | 10.774.912 | | 10.994.768 | | 0 | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 350 | 350 | 10.500.000 | 350 | 10.616.689,72 | 350 | 10.774.912 | 350 | 10.994.768 | 350 | 0 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |

| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 10.500.000 | | 10.616.689,7 | | 10.774.913,92 | | 10.994.771,76 | | 45.010.336,8 | | |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 350 | 350 | 10.500.000 | 350 | 10.616.689,7 | 350 | 10.774.913,92 | 350 | 10.994.771,76 | 350 | 45.010.336,8 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 49.618.400 | | 50.169.824,47 | | 50.917.515,94 | | 51.956.461,25 | | 53.174.783,23 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 49.618.400 | 100 | 50.169.824,47 | 100 | 50.917.515,94 | 100 | 51.956.461,25 | 100 | 53.174.783,23 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 49.618.400 | | 50.169.824,47 | | 50.917.515,94 | | 51.956.461,25 | | 53.174.783,23 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 14 | 14 | 49.618.400 | 14 | 50.169.824,47 | 14 | 50.917.515,94 | 14 | 51.956.461,25 | 14 | 53.174.783,23 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 49.618.400 | | 50.169.824,47 | | 50.917.515,94 | | 51.956.461,25 | | 53.174.783,23 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 14 | 14 | 49.618.400 | 14 | 50.169.824,47 | 14 | 50.917.515,94 | 14 | 51.956.461,25 | 14 | 53.174.783,23 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 85.100.000 | | 86.045.742,35 | | 87.328.100,19 | | 89.109.984,46 | | 91.199.515,76 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 85.100.000 | 100 | 86.045.742,35 | 100 | 87.328.100,19 | 100 | 89.109.984,46 | 100 | 91.199.515,76 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 85.100.000 | | 86.045.742,35 | | 87.328.100,19 | | 89.109.984,46 | | 91.199.515,76 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.605 | 1.605 | 85.100.000 | 1.605 | 86.045.742,35 | 1.605 | 87.328.100,19 | 1.605 | 89.109.984,46 | 1.605 | 91.199.515,76 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 85.100.000 | | 86.045.742,35 | | 87.328.100,19 | | 89.109.984,46 | | 91.199.515,76 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.605 | 1.605 | 85.100.000 | 1.605 | 86.045.742,35 | 1.605 | 87.328.100,19 | 1.605 | 89.109.984,46 | 1.605 | 91.199.515,76 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 10.000.000 | | 10.111.133,06 | | 10.261.821,41 | | 10.471.208,51 | | 10.716.746,86 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.111.133,06 | 100 | 10.261.821,41 | 100 | 10.471.208,51 | 100 | 10.716.746,86 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 10.000.000 | | 10.111.133,06 | | 10.261.821,41 | | 10.471.208,51 | | 10.716.746,86 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang bersih dan baik | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.111.133,06 | 2 | 10.261.821,41 | 2 | 10.471.208,51 | 2 | 10.716.746,86 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | 5.000.000 | | 5.055.566,53 | | 5.130.910 | | 5.235.600 | | 5.358.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.055.566,53 | 2 | 5.130.910 | 2 | 5.235.600 | 2 | 5.358.000 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 5.000.000 | | 5.055.566,53 | | 5.130.911,41 | | 5.235.608,51 | | 5.358.746,86 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.055.566,53 | 2 | 5.130.911,41 | 2 | 5.235.608,51 | 2 | 5.358.746,86 | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas. Penetapannya berlandaskan pada isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kemampuan pendanaan daerah. Secara eksplisit, Program Prioritas Kecamatan Krejengan dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Krejengan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Krejengan**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Krejengan | | | | | | | | | |
| 2. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 3. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 85 | 85,85 | 86,71 | 87,58 | 88,45 | 89,34 | 90,23 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Krejengan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Krejengan**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | | | | | | | | | | |
| | **NIHIL** | | | | | | | | | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Krejengan.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Krejengan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Krejengan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Krejengan.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Krejengan. Evaluasi ini

mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;

2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;
3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

CAMAT KREJENGAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN KREJENGAN

**BAGUS HERIWAHJUDI,S.Sos,.M.Si**
Pembina Tingkat I
NIP. 19671208 198903 1 010

# RENCANA STRATEGIS

# (RENSTRA)

# KECAMATAN LECES

# TAHUN 2025-2029

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KECAMATAN LECES**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leces Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Leces Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Leces. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Leces. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Leces dengan OPD dan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 22 September 2025

Plt. CAMAT LECES
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN LECES

**HARIYANTO, S.Sos, M.Si**
Pembina Tingkat I
NIP. 197107222002121002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 6
1.4 Sistematika Penulisan ..... 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Leces ..... 10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Leces ..... 17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Leces ..... 21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 27
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Leces .... 27
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Leces ..... 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Leces Tahun 2025-2029 ..... 32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Leces dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 40
4.1 Uraian Program ..... 40
4.2 Uraian Kegiatan ..... 44
BAB V PENUTUP ..... 79
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 79
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 80

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..…… 18
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan …… 19
Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..….. 19
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ……. 22
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo (2020-2024) …… 23
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Leces ……..… 30
Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 …….. 35
Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Leces …… 36
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Leces ……... 38
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Leces ……..…… 33
Tabel 4.1 Program Kecamatan Leces ……. 42
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Leces ……. 45
Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Leces …….. 58
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Leces ……. 61
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ……. 77
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Leces …….. 78
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Leces …… 78

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Leces ……..…… 17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo ..…. 33
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah …… 34
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Leces …….. 45

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Leces menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Leces setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Leces juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Leces. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Leces berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan Urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Leces terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leces yang disusun pada periode Tahun 2025–2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Leces

untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Leces berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Leces dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Leces disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Leces akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Leces dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Leces untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Leces berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta pembangunan wilayah melalui perencanaan sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan;
1.4 Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LECES**

Bab II memuat:

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Leces;
2.2 Sumber Daya Kecamatan Leces;
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Leces;
2.4 Kelompok Sasaran Layanan;
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Leces;
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Leces.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat:

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Leces Tahun 2025–2029;
3.2 Strategi dan Arah kebijakan Kecamatan Leces dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub. Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub. Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Leces 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Leces; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Leces

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Leces Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut:

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana,

pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
   b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
   c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan

keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;

d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi:
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi

pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Leces**

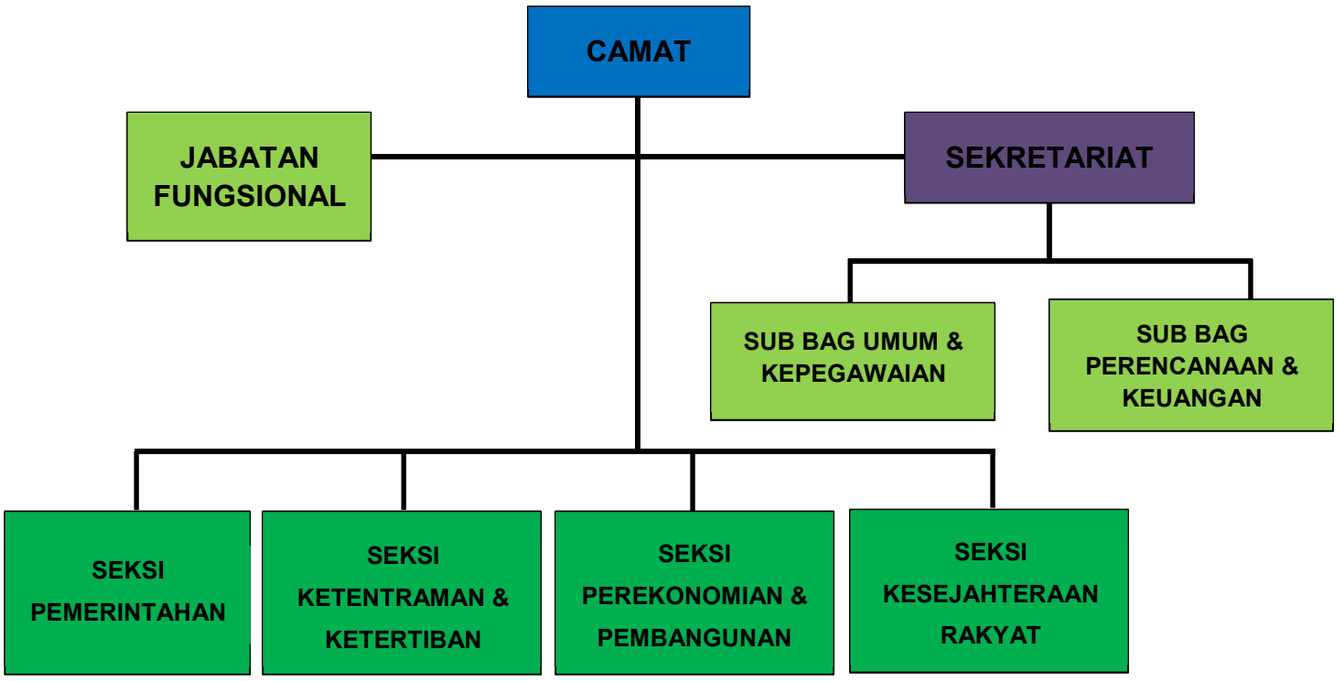


Struktur Organisasi Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan membawahi:
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Leces

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Leces.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Leces sebanyak 23 orang dengan rincian: **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 15 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 2 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 4 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Leces berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **1** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | **3** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 10. | Honorer | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | **7** |
| **Jumlah** | | **0** | **1** | **11** | **0** | **9** | **2** | **20** | **2** | **23** |

*Sumber data Kecamatan Leces*

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jabatan sebagai berikut:

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | **21** | 1 | 4 | 9 | 7 | **21** |
| 2. | Perempuan | - | - | 1 | 1 | - | - | **2** | 1 | 1 | - | - | **2** |
| **Jumlah** | | **-** | **4** | **9** | **2** | **1** | **7** | **23** | **2** | **5** | **9** | **7** | **23** |

*Sumber data Kecamatan Leces*

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.3

Jumlah Sarana Prasarana

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak Berat (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lain-lain Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Lain-lain tugu/tanda batas | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Portable Generating Set | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Genset | - | - | 0 |
| 10 | Kursi Kerja | 17 | 16 | 1 |
| 11 | Kursi Lipat | 15 | 13 | 2 |
| 12 | P.C Unit | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Sepeda Motor | 10 | 8 | 2 |
| 15 | Sport Utility Vehicle (SUV) | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Mesin Fotocopy Double Folio | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Lemari Besi/Metal | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lemari Kayu | 4 | 0 | 4 |
| 19 | Filing Cabinet Besi | 6 | 5 | 1 |
| 20 | Brandkas | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Lemari Kaca | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alat Penghancur Kertas | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mesin Absensi | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Papan Pengumuman | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Meja Kerja Kayu | 20 | 15 | 5 |
| 26 | Kursi Besi/Metal | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Meja Rapat | 4 | 3 | 1 |
| 28 | Meja Resepsionis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Meja 1/2 Biro | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kasur/Spring Bed | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kursi Rapat | 65 | 55 | 10 |
| 32 | Kursi Tamu | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Bangku Tunggu | 2 | 2 | 0 |
| 34 | Filling Besi/Metal | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lemari Es | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Televisi | 3 | 3 | 0 |
| 37 | Sound System | 2 | 2 | 0 |
| 38 | Mimbar/Podium | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Karpet | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Gordyin/Kray | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Mesin Pompa Air | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Meja Tamu Biasa | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 7 | 5 | 2 |
| 46 | Layar Film/Projector | 2 | 1 | 1 |
| 47 | Wireless Amplifier | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Antene SHF Portable | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Lap Top | 7 | 5 | 2 |
| 50 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 2 | 2 | 0 |
| 51 | External/ Portable Hardisk | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Hard disk Eksternal | 2 | 0 | 2 |
| 53 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1 | 0 | 1 |

*Sumber data Kecamatan Leces*

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Leces

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leces yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Leces telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Leces dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024-2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025-2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025-2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

Target dan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.1 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | - | - | 83,93 | 99,00 | - | - | - | 83,93 | 99,00 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | - | - | 87,5 | 99,00 | - | - | - | 87,50 | 99,00 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | - | - | 90 | 98,00 | - | - | - | 90,00 | 98,00 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | - | - | - | - | 100 | | - | - | - | 98,00 | - | - | - | - | 98,00 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | - | - | 80 | 80 | 74 | | 72,40 | 72,71 | 70,51 | 71,15 | - | - | 90,89 | 88,14 | 96,15 |

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut:

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | - | **2.515.180.780,00** | **2.643.733.333,00** | - | - | - | **2.247.098.598,00** | **2.443.327.231,00** | - | - | - | **89,34** | **92,42** | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | - | 16.640.100,00 | 2.775.000,00 | - | - | - | 8.970.500,00 | 2.720.000,00 | - | - | - | 53,91 | 98,02 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | - | 7.040.100,00 | 2.775.000,00 | | | - | 3.955.500,00 | 2.720.000,00 | - | - | - | 56,19 | 98,02 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | - | 2.400.000,00 | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | - | 1.600.000,00 | - | | | - | 1.480.000,00 | - | - | - | - | 92,50 | - | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | - | 1.600.000,00 | - | | | - | 1.480.000,00 | - | - | - | - | 92,50 | - | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | - | 1.200.000,00 | - | | | - | 760.000,00 | - | - | - | - | 63,33 | - | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | - | 1.600.000,00 | - | | | - | 740.000,00 | - | - | - | - | 46,25 | - | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | - | 1.200.000,00 | - | | | - | 555.000,00 | - | - | - | - | 46,25 | - | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | - | 2.181.177.000,00 | 2.277.914.897,00 | - | - | - | 1.958.548.413,00 | 2.085.688.888,00 | - | - | - | 89,79 | 91,56 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - | 2.174.877.000,00 | 2.231.094.897,00 | - | - | - | 1.957.588.413,00 | 2.042.101.388,00 | - | - | - | 90,01 | 91,53 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | - | 1.400.000,00 | 46.820.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | 43.587.500,00 | - | - | - | 14,29 | 93,10 | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | - | 1.600.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | | |

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | - | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | - | - | 900.000,00 | - | - | - | - | 760.000,00 | - | - | - | - | 84,44 | - | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | - | 900.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | - | 900.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 35.596.100,00 | 38.318.812,00 | - | - | - | 34.665.856,00 | 37.745.740,00 | - | - | - | 97,39 | 98,50 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | - | 2.044.400,00 | 2.144.000,00 | - | - | - | 1.659.000,00 | 2.116.000,00 | - | - | - | 81,15 | 98,69 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | - | 7.973.500,00 | 2.936.900,00 | - | - | - | 7.789.500,00 | 2.865.400,00 | - | - | - | 97,69 | 97,57 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | - | 6.688.200,00 | 3.751.500,00 | - | - | - | 6.547.000,00 | 3.672.000,00 | - | - | - | 97,89 | 97,88 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | - | - | 14.479.400,00 | 16.358.000,00 | - | - | - | 14.470.356,00 | 16.336.340,00 | - | - | - | 99,94 | 99,87 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | - | - | 2.480.000,00 | 11.196.412,00 | - | - | - | 2.280.000,00 | 10.836.000,00 | - | - | - | 91,94 | 96,78 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | - | 1.930.600,00 | 1.932.000,00 | - | - | - | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | - | - | - | 99,45 | 99,38 | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | 50.589.000,00 | 36.320.000,00 | - | - | - | 49.700.000,00 | 36.065.000,00 | - | - | - | 98,24 | 99,30 | | |
| Pengadaan Mebel | - | - | - | 30.580.000,00 | 19.380.000,00 | - | - | - | 30.000.000,00 | 19.210.000,00 | - | - | - | 98,10 | 99,12 | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | - | 20.009.000,00 | 16.940.000,00 | - | - | - | 19.700.000,00 | 16.855.000,00 | - | - | - | 98,46 | 99,50 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 213.778.580,00 | 252.204.624,00 | - | - | - | 177.875.029,00 | 245.615.303,00 | - | - | - | 83,21 | 97,39 | | |

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | - | 45.500.000,00 | 42.000.000,00 | | - | - | 37.095.077,00 | 35.410.679,00 | - | - | - | 81,53 | 84,31 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | - | 168.278.580,00 | 210.204.624,00 | | - | - | 140.779.952,00 | 210.204.624,00 | - | - | - | 83,66 | 100,00 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 17.400.000,00 | 36.200.000,00 | - | - | - | 17.338.800,00 | 35.492.300,00 | - | - | - | 99,65 | 98,05 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | - | 3.800.000,00 | 3.600.000,00 | | - | - | 3.738.800,00 | 3.372.300,00 | - | - | - | 98,39 | 93,68 | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | - | - | 8.120.000,00 | | - | - | - | 8.000.000,00 | - | - | - | #DIV/0! | 98,52 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | - | 13.600.000,00 | 24.480.000,00 | | - | - | 13.600.000,00 | 24.120.000,00 | - | - | - | 100,00 | 98,53 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | **-** | **41.219.800,00** | **25.400.000,00** | **-** | **-** | **-** | **34.427.000,00** | **24.810.000,00** | **-** | **-** | **-** | **83,52** | **97,68** | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | - | 27.026.200,00 | 14.200.000,00 | - | - | - | 23.416.000,00 | 13.895.000,00 | - | - | - | 86,64 | 97,85 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | - | - | 27.026.200,00 | 14.200.000,00 | - | - | - | 23.416.000,00 | 13.895.000,00 | - | - | - | 86,64 | 97,85 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | - | 14.193.600,00 | 11.200.000,00 | - | - | - | 11.011.000,00 | 10.915.000,00 | - | - | - | 77,58 | 97,46 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | - | - | - | 14.193.600,00 | 11.200.000,00 | - | - | - | 11.011.000,00 | 10.915.000,00 | - | - | - | 77,58 | 97,46 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | - | - | **387.943.400,00** | **15.600.000,00** | - | - | - | **337.825.000,00** | **14.907.000,00** | - | - | - | **87,08** | **95,56** | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | - | 337.943.400,00 | 15.600.000,00 | - | - | - | 290.127.000,00 | 14.907.000,00 | - | - | - | 85,85 | 95,56 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | - | 15.370.600,00 | 5.200.000,00 | - | - | - | 9.286.000,00 | 5.040.000,00 | - | - | - | 60,41 | 96,92 | | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | - | - | 303.572.800,00 | 5.400.000,00 | - | - | - | 262.941.000,00 | 5.187.000,00 | - | - | - | 86,62 | 96,06 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | - | - | 19.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | - | 17.900.000,00 | 4.680.000,00 | - | - | - | 94,21 | 93,60 | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 47.698.000,00 | - | - | - | - | 95,40 | - | | |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 47.698.000,00 | - | - | - | - | 95,40 | - | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | - | - | **55.548.400,00** | **61.211.000,00** | - | - | - | **49.776.000,00** | **60.346.000,00** | - | - | - | **89,61** | **98,59** | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | - | 55.548.400,00 | 61.211.000,00 | - | - | - | 49.776.000,00 | 60.346.000,00 | - | - | - | 89,61 | 98,59 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | - | 55.548.400,00 | 61.211.000,00 | - | - | - | 49.776.000,00 | 60.346.000,00 | - | - | - | 89,61 | 98,59 | | |

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | - | - | **52.033.200,00** | **52.400.000,00** | - | - | - | **41.998.000,00** | **51.128.000,00** | - | - | - | **80,71** | **97,57** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | - | 52.033.200,00 | 52.400.000,00 | - | - | - | 41.998.000,00 | 51.128.000,00 | - | - | - | 80,71 | 97,57 | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | - | - | 52.033.200,00 | 52.400.000,00 | - | - | - | 41.998.000,00 | 51.128.000,00 | - | - | - | 80,71 | 97,57 | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| **Jumlah** | - | - | - | **3.051.925.580,00** | **2.798.344.333,00** | - | - | - | **2.711.124.598,00** | **2.594.518.231,00** | - | - | - | **88,83** | **92,72** | | |

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaranwilayah Kecamatan Leces:

1. Masyarakat Umum - Warga yang tinggal di Kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Leces

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan:

- **Keterbatasan Sumber Daya**: Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur**: Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.
- **Birokrasi yang Kaku**: Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.

- **Akses dan Kesenjangan Digital**: Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah**: Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital**: Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar Sektor**: Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur**: Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu**: Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat**: Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Leces

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya:

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Leces adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

Tabel 2.6

Isu Strategis Kecamatan Leces

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti kawasan pegunungan | Belum optimalnya penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br><br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal untuk kesejahteraan dan konservasi | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br><br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, serta kehutanan | Masih tingginya angka kemiskinan dan ketergantungan | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

*Sumber data Kecamatan Leces*

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Leces Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Leces Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu: ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leces, dalam hal ini Kecamatan Leces diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Leces Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu:

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1

Konsep Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo

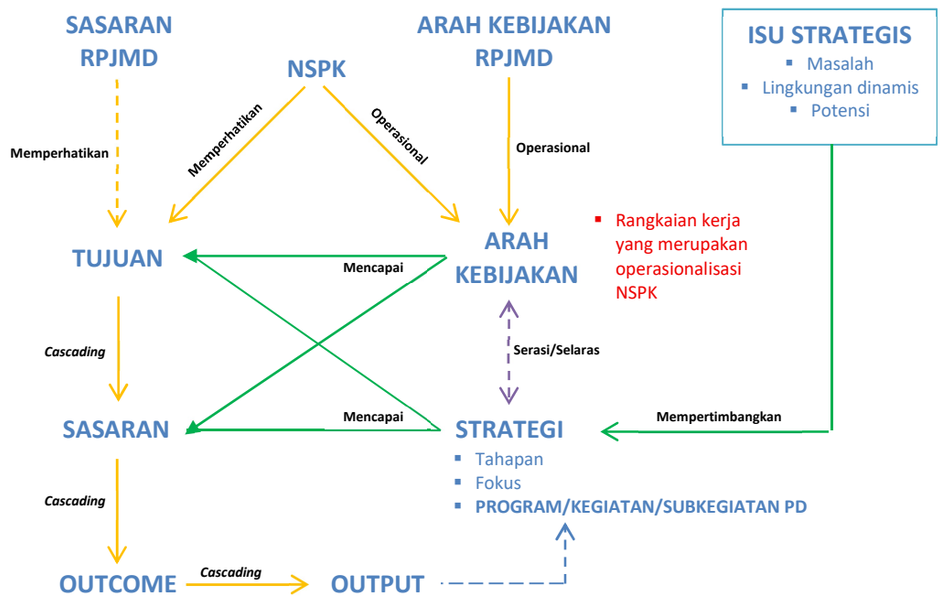


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

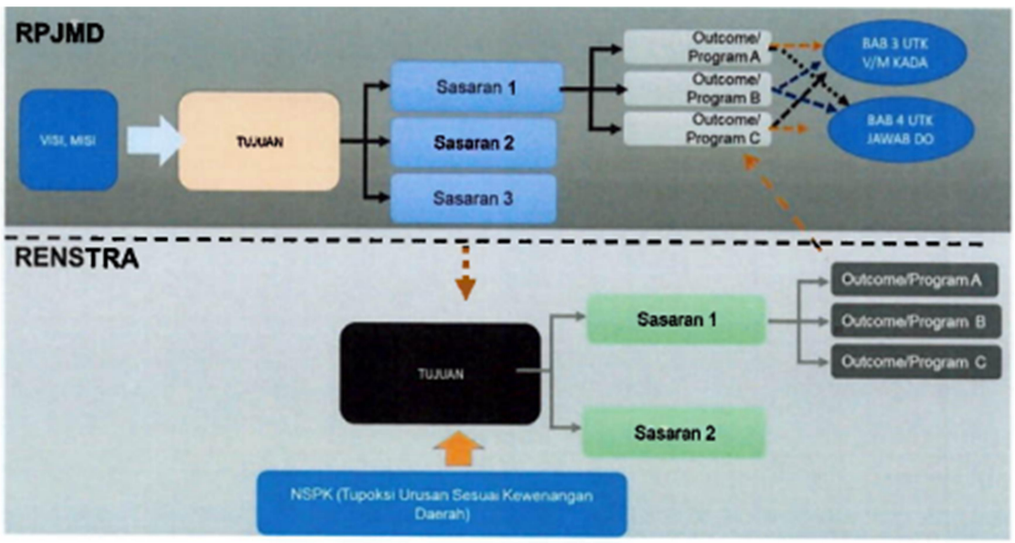


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Leces

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| **7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Leces** | | | | | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas tata kelola perangkat daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 87,81 | 88,69 | 89,57 | 90,47 | 91,38 | 92,29 | 93,21 | |

*Sumber data SIPD Renstra*

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, diperlukan Misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan

keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Leces

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

Tabel 3.1.2

Definisi Operasional IKU Kecamatan Leces

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut :<br>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| 3. | Persentase Kenaikan LHE | Nilai hasil atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | $\frac{\text{Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1)}}{\quad} \times 100$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | AKIP Perangkat Daerah | Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | Nilai LHE AKIP tahun (n-1)<br><br>Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

*Sumber data Cascading Kecamatan Leces*

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Leces dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Leces dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan

## B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Leces

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Leces dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Kecamatan Leces

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

*Sumber data Kecamatan Leces*

## C. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Leces

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Leces sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Leces:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Leces dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Leces, sebagai berikut:

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Kecamatan Leces

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | 1. Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul. | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

*Sumber data Kecamatan Leces*

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman,

ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

# Tabel 4.1

## Program Kecamatan Leces

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.646.781.824,09 | | 2.676.196.320,65 | | 2.716.080.238,61 | | 2.771.500.437,2 | | 2.836.489.079,53 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.606.218.224,09 | | 2.635.181.924,96 | | 2.674.454.596,72 | | 2.729.025.445,84 | | 2.793.018.096,25 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 71,50 | 72,21 | 72,94 | 2.606.218.224,09 | 73,67 | 2.635.181.924,96 | 74,40 | 2.674.454.596,72 | 75,15 | 2.729.025.445,84 | 75,90 | 2.793.018.096,25 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 7.000.000 | | 7.077.793,14 | | 7.183.274,99 | | 7.329.845,96 | | 7.501.722,8 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 7.000.000 | 100 | 7.077.793,14 | 100 | 7.183.274,99 | 100 | 7.329.845,96 | 100 | 7.501.722,8 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 11.200.000 | | 11.324.469,03 | | 11.493.239,98 | | 11.727.753,54 | | 12.002.756,48 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 11.200.000 | 100 | 11.324.469,03 | 100 | 11.493.239,98 | 100 | 11.727.753,54 | 100 | 12.002.756,48 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 12.163.600 | | 12.298.777,81 | | 12.482.069,09 | | 12.736.759,19 | | 13.035.422,21 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 12.163.600 | 100 | 12.298.777,81 | 100 | 12.482.069,09 | 100 | 12.736.759,19 | 100 | 13.035.422,21 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 6.200.000 | | 6.268.902,49 | | 6.362.329,27 | | 6.492.149,27 | | 6.644.383,05 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 6.200.000 | 100 | 6.268.902,49 | 100 | 6.362.329,27 | 100 | 6.492.149,27 | 100 | 6.644.383,05 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 4.000.000 | | 4.044.453,22 | | 4.104.728,56 | | 4.188.483,4 | | 4.286.698,74 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.044.453,22 | 100 | 4.104.728,56 | 100 | 4.188.483,4 | 100 | 4.286.698,74 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2646781824.09 | | 2676196320.65 | | 2716080238.61 | | 2771500437.20 | | 2836489079.53 | |

*Sumber data SIPD Renstra*

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sun Kegiatan Renstra Kecamatan Leces

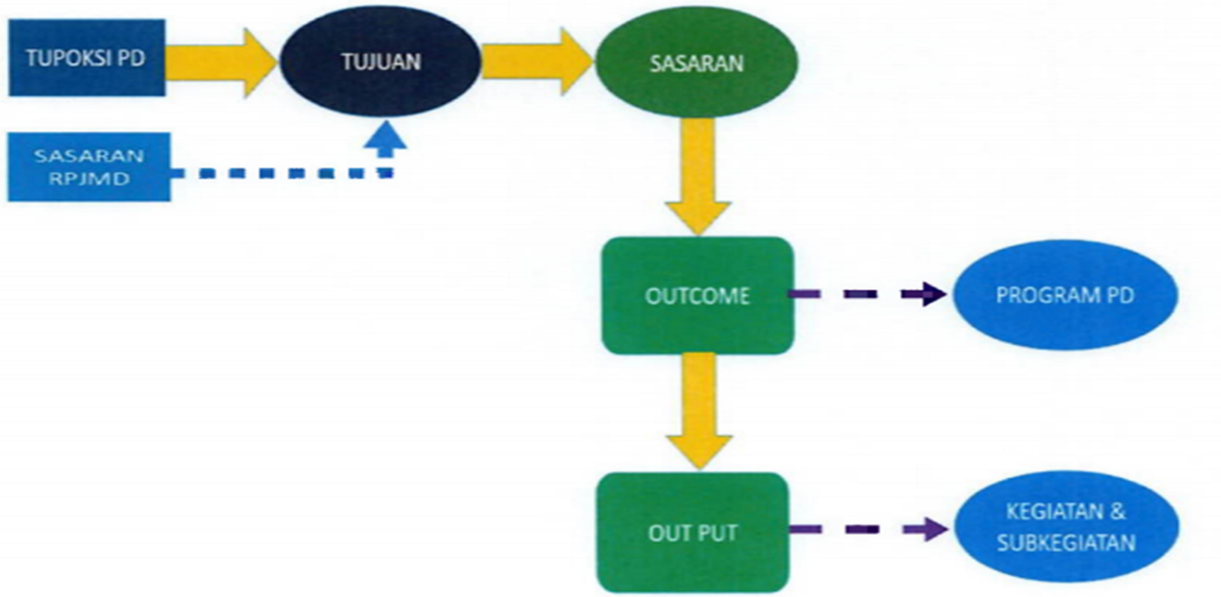

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Leces

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Leces** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas tata kelola perangkat daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |
| | | | | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | Prosentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | Jumlah Kegiatan dan Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Jumlah Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pengawasn Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

*Sumber data SIPD Renstra*

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2.1**

**Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Leces**

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | |

*Sumber Data Cascading Kecamatan Leces*

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut:

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Leces

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.646.781.824,09 | | 2.676.196.320,65 | | 2.716.080.238,61 | | 2.771.500.437,2 | | 2.836.489.079,53 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.606.218.224,09 | | 2.635.181.924,96 | | 2.674.454.596,72 | | 2.729.025.445,84 | | 2.793.018.096,25 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 71,50 | 72,94 | 2.606.218.224,09 | 73,67 | 2.635.181.924,96 | 74,40 | 2.674.454.596,72 | 75,15 | 2.729.025.445,84 | 75,90 | 2.793.018.096,25 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Leces | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | | | | 3.600.000 | | 3.900.000 | | 4.200.000 | | 4.500.000 | | 4.800.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 3.600.000 | 2 | 3.900.000 | 2 | 4.200.000 | 2 | 4.500.000 | 2 | 4.800.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1.600.000 | | 1.700.000 | | 1.800.000 | | 1.900.000 | | 2.000.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 2 | 1.600.000 | 2 | 1.700.000 | 2 | 1.800.000 | 2 | 1.900.000 | 2 | 2.000.000 | | |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1.000.000 | | 1.100.000 | | 1.200.000 | | 1.300.000 | | 1.400.000 | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 1.000.000 | 2 | 1.100.000 | 2 | 1.200.000 | 2 | 1.300.000 | 2 | 1.400.000 | | |
| 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | 1.000.000 | | 1.100.000 | | 1.200.000 | | 1.300.000 | | 1.400.000 | | |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 1.000.000 | 2 | 1.100.000 | 2 | 1.200.000 | 2 | 1.300.000 | 2 | 1.400.000 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.341.908.224,09 | | 2.368.931.924,96 | | 2.406.264.596,72 | | 2.458.835.445,84 | | 2.520.938.096,25 | | |
| Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 11 | 11 | 2.341.908.224,09 | 11 | 2.368.931.924,96 | 11 | 2.406.264.596,72 | 11 | 2.458.835.445,84 | 11 | 2.520.938.096,25 | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.339.208.224,09 | | 2.365.931.924,96 | | 2.403.064.596,72 | | 2.455.435.445,84 | | 2.517.338.096,25 | | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM /** | **INDIKATOR OUTCOME /** | **BASELINE TAHUN** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |

| OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | OUTPUT | 2024 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 11 | 11 | 2.339.208.224,09 | 11 | 2.365.931.924,96 | 11 | 2.403.064.596,72 | 11 | 2.455.435.445,84 | 11 | 2.517.338.096,25 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.700.000 | | 1.900.000 | | 2.000.000 | | 2.100.000 | | 2.200.000 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 4 | 4 | 1.700.000 | 4 | 1.900.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.100.000 | 4 | 2.200.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1.000.000 | | 1.100.000 | | 1.200.000 | | 1.300.000 | | 1.400.000 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 2 | 1.000.000 | 2 | 1.100.000 | 2 | 1.200.000 | 2 | 1.300.000 | 2 | 1.400.000 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 10.000.000 | | 10.330.000 | | 10.660.000 | | 11.040.000 | | 11.320.000 | | |
| Prosentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.330.000 | 1 | 10.660.000 | 1 | 11.040.000 | 1 | 11.320.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.600.000 | | 1.700.000 | | 1.800.000 | | 1.900.000 | | 2.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 1.600.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.800.000 | 1 | 1.900.000 | 1 | 2.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 650.000 | | 660.000 | | 670.000 | | 680.000 | | 690.000 | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 650.000 | 1 | 660.000 | 1 | 670.000 | 1 | 680.000 | 1 | 690.000 | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 1.150.000 | | 1.160.000 | | 1.170.000 | | 1.180.000 | | 1.190.000 | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 1.150.000 | 1 | 1.160.000 | 1 | 1.170.000 | 1 | 1.180.000 | 1 | 1.190.000 | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 3.700.000 | | 3.710.000 | | 3.720.000 | | 3.730.000 | | 3.740.000 | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 3.700.000 | 1 | 3.710.000 | 1 | 3.720.000 | 1 | 3.730.000 | 1 | 3.740.000 | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1.700.000 | | 1.800.000 | | 1.900.000 | | 2.050.000 | | 2.100.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.800.000 | 1 | 1.900.000 | 1 | 2.050.000 | 1 | 2.100.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 1.200.000 | | 1.300.000 | | 1.400.000 | | 1.500.000 | | 1.600.000 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.300.000 | 1 | 1.400.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.600.000 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 3.300.000 | | 3.500.000 | | 3.700.000 | | 3.900.000 | | 4.100.000 | | |
| Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 3.300.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.700.000 | 1 | 3.900.000 | 1 | 4.100.000 | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 1.600.000 | | 1.700.000 | | 1.800.000 | | 1.900.000 | | 2.000.000 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 3 | 3 | 1.600.000 | 3 | 1.700.000 | 3 | 1.800.000 | 3 | 1.900.000 | 3 | 2.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.700.000 | | 1.800.000 | | 1.900.000 | | 2.000.000 | | 2.100.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.800.000 | 1 | 1.900.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.100.000 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 246.300.000 | | 247.400.000 | | 248.500.000 | | 249.600.000 | | 250.700.000 | | |
| Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 246.300.000 | 12 | 247.400.000 | 12 | 248.500.000 | 12 | 249.600.000 | 12 | 250.700.000 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 31.300.000 | | 31.400.000 | | 31.500.000 | | 31.600.000 | | 31.700.000 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 31.300.000 | 12 | 31.400.000 | 12 | 31.500.000 | 12 | 31.600.000 | 12 | 31.700.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 215.000.000 | | 216.000.000 | | 217.000.000 | | 218.000.000 | | 219.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 215.000.000 | 12 | 216.000.000 | 12 | 217.000.000 | 12 | 218.000.000 | 12 | 219.000.000 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1.110.000 | | 1.120.000 | | 1.130.000 | | 1.150.000 | | 1.160.000 | | |
| Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 8 | 1.110.000 | 8 | 1.120.000 | 8 | 1.130.000 | 8 | 1.150.000 | 8 | 1.160.000 | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1.110.000 | | 1.120.000 | | 1.130.000 | | 1.150.000 | | 1.160.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 8 | 1.110.000 | 8 | 1.120.000 | 8 | 1.130.000 | 8 | 1.150.000 | 8 | 1.160.000 | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 7.000.000 | | 7.077.793,14 | | 7.183.274,99 | | 7.329.845,96 | | 7.501.722,8 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 7.000.000 | 100 | 7.077.793,14 | 100 | 7.183.274,99 | 100 | 7.329.845,96 | 100 | 7.501.722,8 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Leces | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 3.500.000 | | 3.577.793,14 | | 3.683.274,99 | | 3.829.845,96 | | 4.001.722,8 | | |
| Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 4 | 4 | 3.500.000 | 4 | 3.577.793,14 | 4 | 3.683.274,99 | 4 | 3.829.845,96 | 4 | 4.001.722,8 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 3.500.000 | | 3.577.793,14 | | 3.683.274,99 | | 3.829.845,96 | | 4.001.722,8 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 4 | 4 | 3.500.000 | 4 | 3.577.793,14 | 4 | 3.683.274,99 | 4 | 3.829.845,96 | 4 | 4.001.722,8 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang | | | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | | |
| 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 11.200.000 | | 11.324.469,03 | | 11.493.239,98 | | 11.727.753,54 | | 12.002.756,48 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 11.200.000 | 100 | 11.324.469,03 | 100 | 11.493.239,98 | 100 | 11.727.753,54 | 100 | 12.002.756,48 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Leces | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 11.200.000 | | 11.324.469,03 | | 11.493.239,98 | | 11.727.753,54 | | 12.002.756,48 | | |
| Jumlah Kegiatan dan Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 1 | 1 | 11.200.000 | 1 | 11.324.469,03 | 1 | 11.493.239,98 | 1 | 11.727.753,54 | 1 | 12.002.756,48 | | |
| | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 3.000.000 | | 3.124.469,03 | | 3.293.239,98 | | 3.527.753,54 | | 3.802.756,48 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 6 | 6 | 3.000.000 | 6 | 3.124.469,03 | 6 | 3.293.239,98 | 6 | 3.527.753,54 | 6 | 3.802.756,48 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 1 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | | |
| 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 5.200.000 | | 5.200.000 | | 5.200.000 | | 5.200.000 | | 5.200.000 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | 2 | 5.200.000 | 2 | 5.200.000 | 2 | 5.200.000 | 2 | 5.200.000 | 2 | 5.200.000 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 12.163.600 | | 12.298.777,81 | | 12.482.069,09 | | 12.736.759,19 | | 13.035.422,21 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 12.163.600 | 100 | 12.298.777,81 | 100 | 12.482.069,09 | 100 | 12.736.759,19 | 100 | 13.035.422,21 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Leces | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 12.163.600 | | 12.298.777,81 | | 12.482.069,09 | | 12.736.759,19 | | 13.035.422,21 | | |
| Jumlah Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | 12.163.600 | | 12.298.777,81 | | 12.482.069,09 | | 12.736.759,19 | | 13.035.422,21 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 12.163.600 | | 12.298.777,81 | | 12.482.069,09 | | 12.736.759,19 | | 13.035.422,21 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1 | 12.163.600 | 1 | 12.298.777,81 | 1 | 12.482.069,09 | 1 | 12.736.759,19 | 1 | 13.035.422,21 | | |
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 6.200.000 | | 6.268.902,49 | | 6.362.329,27 | | 6.492.149,27 | | 6.644.383,05 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 6.200.000 | 100 | 6.268.902,49 | 100 | 6.362.329,27 | 100 | 6.492.149,27 | 100 | 6.644.383,05 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Leces | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 6.200.000 | | 6.268.902,49 | | 6.362.329,27 | | 6.492.149,27 | | 6.644.383,05 | | |
| Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 300 | 300 | 6.200.000 | 300 | 6.268.902,49 | 300 | 6.362.329,27 | 300 | 6.492.149,27 | 300 | 6.644.383,05 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 6.200.000 | | 6.268.902,49 | | 6.362.329,27 | | 6.492.149,27 | | 6.644.383,05 | | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT** | **INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT** | **BASELINE TAHUN 2024** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |
| | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | | |
| | | | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 300 | 300 | 6.200.000 | 300 | 6.268.902,49 | 300 | 6.362.329,27 | 300 | 6.492.149,27 | 300 | 6.644.383,05 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 4.000.000 | | 4.044.453,22 | | 4.104.728,56 | | 4.188.483,4 | | 4.286.698,74 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.044.453,22 | 100 | 4.104.728,56 | 100 | 4.188.483,4 | 100 | 4.286.698,74 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Leces | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 4.000.000 | | 4.044.453,22 | | 4.104.728,56 | | 4.188.483,4 | | 4.286.698,74 | | |
| Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pengawasn Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.044.453,22 | 1 | 4.104.728,56 | 1 | 4.188.483,4 | 1 | 4.286.698,74 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 3.000.000 | | 2.944.453,22 | | 2.904.728,56 | | 2.988.483,4 | | 3.086.698,74 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 3.000.000 | 2 | 2.944.453,22 | 2 | 2.904.728,56 | 2 | 2.988.483,4 | 2 | 3.086.698,74 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 1.000.000 | | 1.100.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 1 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.100.000 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | | |

*Sumber Data SIPD Renstra*

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas. Penetapannya berlandaskan pada isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kemampuan pendanaan daerah. Secara eksplisit, Program Prioritas Kecamatan Leces dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Leces** | | | | |
| 1. | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan<br>7.01.02.2.01.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat<br>7.01.02.2.04.001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | SAE KERJA |

*Sumber data SIPD Renstra*

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Leces sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Leces

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Leces | | | | | | | | | |
| 2. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 3. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 87,81 | 88,69 | 89,57 | 90,47 | 91,38 | 92,29 | 93,21 | |
| 4. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |

*Sumber data SIPD Renstra*

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Leces sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Leces

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | | | | | | | | | | | |
| **NIHIL** | | | | | | | | | | | |

*Sumber data SIPD Renstra*

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Leces.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Leces.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Leces bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Leces.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Leces. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;

2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;
3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

Probolinggo, 22 September 2025

Plt. CAMAT LECES
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN LECES

HARIYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197107222002121002

# RENCANA STRATEGIS

# ( RENSTRA )

# KECAMATAN LUMBANG

# TAHUN 2025-2029

KECAMATAN LUMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbang Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Lumbang. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lumbang. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Lumbang dengan Kecamatan dan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo.

Lumbang, 22 September 2025
Plt. CAMAT LUMBANG
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN LUMBANG

**AGUS SETIJONO, S.Sos**
Pembina Tingkat I
NIP. 19680814 198809 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 7
1.4 Sistematika Penulisan ..... 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lumbang ..... 11
2.2 Sumber Daya Kecamatan Lumbang ..... 18
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbang ..... 22
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 29
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Lumbang ..... 29
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Lumbang ..... 31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 34
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2025-2029 ..... 34
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Lumbang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 42
4.1 Uraian Program ..... 42
4.2 Uraian Kegiatan ..... 46
BAB V PENUTUP ..... 73
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 73
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 74

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..……..… 19

Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ……..…… 19

Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..….. 20

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ……. 23

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo (2020-2024) …… 24

Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Lumbang ……..… 32

Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 …….. 37

Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Lumbang …… 38

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Lumbang ……..... 40

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Lumbang ……..…… 41

Tabel 4.1 Program Kecamatan Lumbang ……. 44

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lumbang ……. 48

Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Lumbang …….. 57

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Lumbang ……. 59

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… 71

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lumbang …….. 71

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Lumbang …… 72

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Lumbang ..... 17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo ..... 35
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah ..... 36
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lumbang ..... 47

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Lumbang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lumbang setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Lumbang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Lumbang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Lumbang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Lumbang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 – 2025

dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbang yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Lumbang untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Lumbang berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Lumbang dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Lumbang disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Lumbang akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Lumbang dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Lumbang untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Lumbang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo;

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta Pembangunan wilayah melalui Perencanaan yang sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LUMBANG**

Bab II memuat :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Lumbang

2.2 Sumber Daya Kecamatan Lumbang

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbang

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Lumbang

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Lumbang

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Lumbang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Lumbang 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lumbang; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Lumbang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Lumbang Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

## 1. CAMAT

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2. SEKRETARIS KECAMATAN

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;

c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :

a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam

rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;

e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta

pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Lumbang**

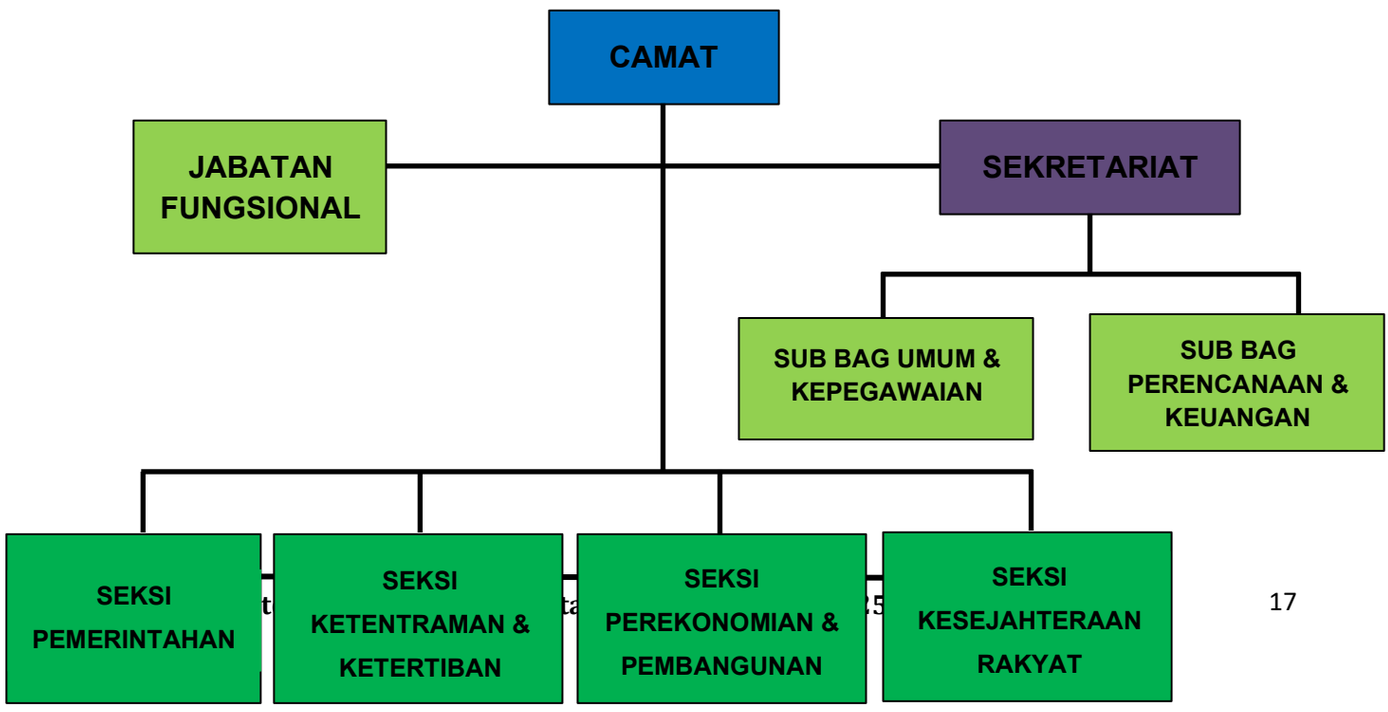

Struktur Organisasi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Lumbang

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Lumbang.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Lumbang sebanyak 20 orang dengan rincian : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 12 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 1 orang perempuan. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 7 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Lumbang berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | **3** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 10. | Honorer | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | **7** |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **6** | **0** | **12** | **2** | **17** | **3** | **20** |

***Sumber data : Kecamatan Lumbang***

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan**

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | **19** | 1 | 5 | 5 | 6 | **17** |
| 2. | Perempuan | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | **4** | - | 1 | 1 | 1 | **3** |
| **Jumlah** | | **-** | **5** | **6** | **1** | **1** | **7** | **23** | **1** | **6** | **6** | **7** | **20** |

***Sumber data : Kecamatan Lumbang***

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai

namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.3**

**Jumlah Sarana Prasarana**

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendaraan Dinas Roda 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Global Positioning System (GPS) | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Mesin Hitung Manual | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lemari Penyimpan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lemari Besi/Metal | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Lemari Kayu | 5 | 5 | 0 |
| 10 | Rak Besi | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Rak Kayu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filing Cabinet Kayu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filing Cabinet Besi | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Peti Uang/Cash Box/Coin Box (Brankas) | 1 | 1 | 0 |
| 15 | CCTV - Camera Control Teletujuanon System | 5 | 0 | 5 |
| 16 | Alat Penghancur Kertas | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Mesin Absensi | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Laser Pointer | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LCD Projector/Infocus | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Alat Kantor Lainnya (Pigora Foto) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Meja Kerja Kayu | 10 | 10 | 0 |
| 22 | Meja Rapat | 4 | 2 | 2 |
| 23 | Kursi Rapat | 6 | 6 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Kursi Lipat | 50 | 50 | 0 |
| 25 | Sofa | 6 | 6 | 0 |
| 26 | Lemari Es | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Kompor Listrik (Alat Dapur) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Teko Listrik | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kitchen Set | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Teletujuan | 2 | 1 | 1 |
| 31 | Sound System | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Wireless | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Dispenser | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Handy Cam | 2 | 2 | 0 |
| 35 | Karpet | 3 | 3 | 0 |
| 36 | Gordyin/Kray | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 2 | 1 | 1 |
| 38 | Kursi Kerja Pejabat lainnya (Kursi Staff) | 8 | 8 | 0 |
| 39 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III | 2 | 2 | 0 |
| 49 | P.C Unit | 4 | 4 | 0 |
| 50 | Lap Top | 7 | 4 | 3 |
| 52 | Hard Disk | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Monitor | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 10 | 6 | 4 |
| 55 | External/ Portable Hardisk | 0 | 0 | 0 |
| 56 | White Board | 2 | 2 | 0 |
| 57 | A.C. Window | 4 | 4 | 0 |
| 58 | A.C. Split | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Rak Piring Alumunium | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Meja Tamu Biasa | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Drone | 0 | 0 | 0 |

***Sumber Data : Kecamatan Lumbang***

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumbang yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Lumbang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Lumbang dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

Target dan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 70,00 | 81,00 | 92,15 | #VALUE! | #VALUE! | 70,00 | 81,00 | 92,15 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100 | 100,00 | #VALUE! | #VALUE! | #### | 100,00 | #### |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100 | 70,10 | #VALUE! | #VALUE! | #### | 100,00 | 70,10 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | - | - | - | - | 100 | | | - | - | 85,00 | #VALUE! | #VALUE! | - | - | 85,00 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | - | - | 81 | 70,91 | 72 | | | 90,00 | 93,67 | 86,81 | #VALUE! | #VALUE! | #### | 132,09 | #### |

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | **2.745.071.544** | **2.245.252.828** | **2.454.783.122** | **-** | **-** | **2.510.007.999** | **2.093.141.905** | **2.134.420.483** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **91** | **93** | **87** | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 40.750.000 | 25.905.000 | 3.170.000 | - | - | 35.289.500 | 22.894.198 | 2.580.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 87 | 88 | 81 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 15.000.000 | 2.605.000 | - | | | 12.860.900 | 2.162.198 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 86 | 83 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | 6.000.000 | 4.250.000 | - | | | 5.364.600 | 3.639.500 | 2.580.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 89 | 86 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | 4.600.000 | 3.750.000 | - | | | 3.419.000 | 3.400.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 74 | 91 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.170.000 | | | 3.250.000 | 3.497.500 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 93 | 100 | - | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | 4.000.000 | 3.600.000 | - | | | 3.750.000 | 2.012.500 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 94 | 56 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | 3.650.000 | 3.700.000 | - | | | 2.700.000 | 3.700.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 74 | 100 | #DIV/0! | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.000.000 | 4.500.000 | | | | 3.945.000 | 4.482.500 | | | | 99 | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.308.510.000 | 1.904.006.000 | 2.077.701.983 | - | - | 2.127.993.745 | 1.764.404.486 | 1.834.674.831 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92 | 93 | 88 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | 2.278.610.000 | 1.887.688.000 | 2061801983 | - | - | 2.107.438.245 | 1.751.757.486 | 1821524831 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92 | 93 | 88 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | 12.000.000 | 4.823.000 | 15900000 | - | - | 10.800.000 | 4.818.000 | 13150000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90 | 100 | 83 | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | 4.000.000 | 4.415.000 | | - | - | 2.653.000 | 1.715.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 66 | 39 | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | 4.400.000 | 1.190.000 | | - | - | 1.896.000 | 1.190.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 43 | 100 | #DIV/0! | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | - | 3.000.000 | 2.440.000 | | - | - | 2.410.000 | 2.374.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 80 | 97 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | 3.000.000 | 1.300.000 | | - | - | 2.396.500 | 420.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 80 | 32 | #DIV/0! | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | 3.500.000 | 2.150.000 | | - | - | 400.000 | 2.130.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 11 | 99 | #DIV/0! | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 63.503.720 | 36.843.500 | 116.769.740 | - | - | 60.455.000 | 36.758.707 | 89.544.763 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95 | 100 | 77 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | 10.332.200 | 3.748.000 | 5461000 | - | - | 10.210.000 | 3.743.000 | 5164000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99 | 100 | 95 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 10.909.800 | 6.485.000 | 12429900 | - | - | 10.050.000 | 6.408.800 | 9736000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92 | 99 | 78 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | 14.776.000 | 6.232.500 | 5805400 | - | - | 13.000.000 | 6.232.500 | 5636000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 88 | 100 | 97 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | - | 13.059.000 | 9.975.000 | 22344000 | - | - | 12.900.000 | 9.971.407 | 20685000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99 | 100 | 93 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | - | 10.926.720 | 5.478.000 | 3519840 | - | - | 10.795.000 | 5.478.000 | 1520000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99 | 100 | 43 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | 3.500.000 | 4.925.000 | 67209600 | - | - | 3.500.000 | 4.925.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 100 | - | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | | | | - | - | | | 46.803.763 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 212.681.244 | 209.917.728 | 251.073.299 | - | - | 183.181.754 | 199.215.814 | 204.556.089 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86 | 95 | 81 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | 3.500.000 | 5.000.000 | | - | - | 2.450.000 | 4.993.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 204 | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | 23.750.000 | 25.000.000 | 26.317.560 | | - | 10.708.082 | 17.717.540 | 16.420.472 | #DIV/0! | #DIV/0! | 45 | 71 | 62 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 1.653.800 | 3.000.000 | 23000000 | | - | 1.632.800 | 2.978.000 | 17761000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99 | 99 | 77 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | 183.777.444 | 176.917.728 | 201755739 | | - | 168.390.872 | 173.527.274 | 170374617 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92 | 98 | 84 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 79.614.980 | 64.562.700 | 6.068.100 | - | - | 95.383.000 | 64.082.700 | 3.064.800 | #DIV/0! | #DIV/0! | 120 | 99 | 51 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | | 20.000.000 | 4.400.000 | | - | | 20.000.000 | 2.374.800 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 54 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | 79.614.980 | 37562700 | | | - | 77.550.000 | 37.082.700 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 48 | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30.005.600 | | | | | 17.833.000 | | | | | | | | | |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | 20.000.000 | 7000000 | | | | | 7.000.000 | | | | #REF! | | | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 10.005.600 | | 1.668.100 | | | | | 690.000 | | | | | | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 10.006.000 | 4.017.900 | - | - | - | 7.705.000 | 5.786.000 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 77 | 144 | #DIV/0! | | |
| Pengadaan Mebel | - | - | 9.820.000 | 3.300.000 | | | - | 7.705.000 | 3.240.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 78 | 98 | #DIV/0! | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 186.000 | 717900 | | | - | - | 2.546.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 0 | | | | | - | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | 4.993.000 | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | **17.028.600** | **66.876.600** | **4.837.940** | **-** | **-** | **7.950.000** | **57.786.574** | **4.800.000** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **47** | **86** | **99** | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 4.000.000 | 55.798.000 | - | - | - | - | 48.898.474 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 88 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | - | 4.000.000 | 23.348.000 | | - | - | | 23.248.474 | | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 100 | #DIV/0! | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | 32.450.000 | | - | - | | 25.650.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 79 | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 13.028.600 | 11.078.600 | 4.837.940 | - | - | 7.950.000 | 8.888.100 | 4.800.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 61 | 80 | 99 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | - | - | 8.936.400 | 11.078.600 | 4.837.940 | - | - | 5.750.000 | 8.888.100 | 4.800.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 64 | 80 | 99 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | - | 4.092.200 | | | - | - | 2.200.000 | - | | #DIV/0! | #DIV/0! | 54 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | **133.136.900** | **400.244.900** | **8.602.930** | **-** | **-** | **115.949.200** | **368.725.930** | **7.490.700** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#REF!** | **29** | **87** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 133.136.900 | 352.218.800 | 4.912.930 | - | - | 115.949.200 | 320.700.930 | 3.950.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 33 | 80 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | 3.387.000 | 25.861.000 | 4.912.930 | - | - | 2.150.000 | 22.661.000 | 3.950.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 8 | 80 | | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | - | 129.749.900 | 326.357.800 | | - | - | 113.799.200 | 298.039.930 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 35 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | - | - | - | 48.026.100 | - | - | - | | 48.025.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | - | #DIV/0! | | |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | | 48.026.100 | | - | - | | 48.025.000 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | - | #DIV/0! | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | 3.690.000 | - | - | | | 3.540.700 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 96 | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | - | | - | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan | | | | | 3.690.000 | | | | | 3.540.700 | | | | | | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | **78.040.000** | **67.639.100** | **72.159.000** | **-** | **-** | **73.464.500** | **67.620.000** | **70.909.500** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#REF!** | **109** | **98** | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 63.190.000 | 67.639.100 | 72.159.000 | - | - | 60.964.000 | 67.620.000 | 70.909.500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 90 | 98 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | 63.190.000 | 67.639.100 | 72.159.000 | - | - | 60.964.000 | 67.620.000 | 70.909.500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 90 | 98 | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | - | 14.850.000 | | | - | - | 12.500.500 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | 14.850.000 | | | - | - | 12.500.500 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | **5.749.700** | **4.262.500** | **46.540.000** | **-** | **-** | **590.000** | **4.257.500** | **45.820.000** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#REF!** | **14** | **98** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 5.749.700 | 4.262.500 | 46.540.000 | - | - | 590.000 | 4.257.500 | 45.820.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 14 | 98 | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | - | 5.749.700 | 4.262.500 | 34.040.000 | - | - | 590.000 | 4.257.500 | 33320000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 14 | 98 | | |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | 12.500.000 | | | | | 12500000 | | | | | | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | **-** | **33.593.700** | **19.109.800** | **19.650.000** | **-** | **-** | **28.195.000** | **18.060.000** | **17.350.000** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#REF!** | **148** | **88** | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 33.593.700 | 19.109.800 | 19.650.000 | - | - | 28.195.000 | 18.060.000 | 17.350.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 148 | 88 | | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | - | - | 5.233.700 | 2.700.000 | 10.000.000 | - | - | 1.950.000 | 2.680.000 | 9.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 72 | 90 | | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | - | 23.510.000 | | | - | - | 22.795.000 | | 4.350.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | - | - | 4.850.000 | | | - | - | 3.450.000 | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 4.000.000 | 4.350.000 | | | | 3.680.000 | | | | | | | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 3.050.000 | 5.300.000 | | | | 2.400.000 | 4.000.000 | | | | | | | |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 7.570.000 | | | | | 7.520.000 | | | | | | | | |
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 1.789.800 | | | | | 1.780.000 | | | | | | | | |
| | | | **3.012.620.444** | **2.803.385.728** | **2.606.572.992** | **-** | **-** | **2.736.156.699** | **2.609.591.909** | **2.280.790.683** | | | | | | | |

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah Kecamatan Lumbang :

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lumbang

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan :

- **Keterbatasan Sumber Daya** : Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur** : Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.
- **Birokrasi yang Kaku** : Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.

- **Akses dan Kesenjangan Digital** : Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah** : Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital** : Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar-Sektor** : Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur** : Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu** : Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat** : Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Lumbang

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Lumbang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

Tabel 2.6

## Isu Strategis Kecamatan Lumbang

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti kawasan pegunungan | Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br><br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br><br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan serta pariwisata berbasis alam | Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumbang, dalam hal ini Kecamatan Lumbang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

**Gambar 3.1**

**Konsep Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo**

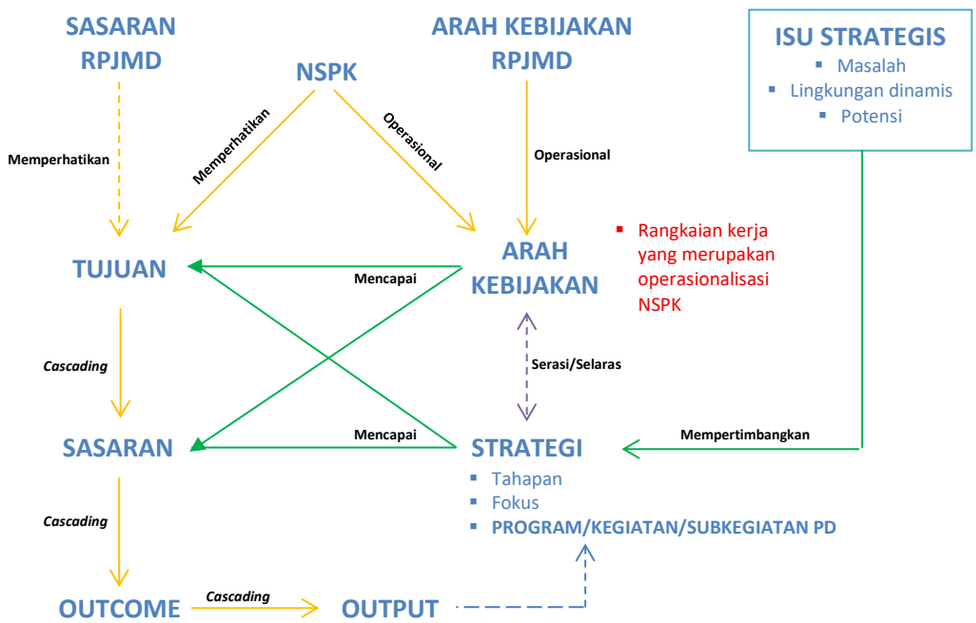


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.2**

**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**

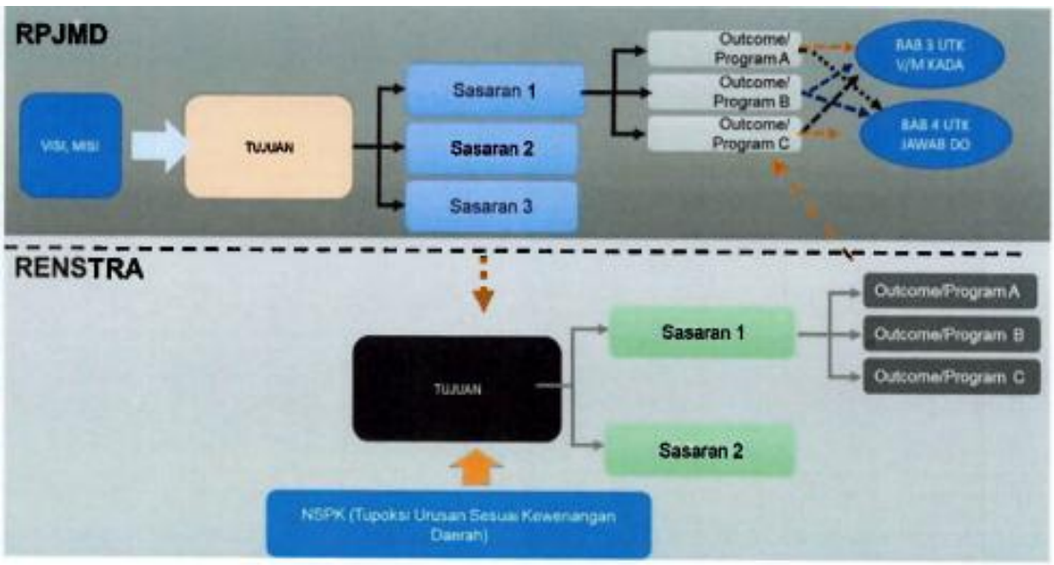


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.1**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbang**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Lumbang** | | | | | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 92,15 | 93,07 | 94 | 94,94 | 95,89 | 96,85 | 97,82 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, diperlukan Misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan

dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lumbang

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

**Tabel 3.1.2**

**Definisi Operasional IKU Kecamatan Lumbang**

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut : $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| 3. | Persentase | Nilai hasil atas Evaluasi | Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | $\frac{\text{Nilai LHE AKIP tahun (n-1)}}{\text{Nilai LHE AKIP tahun (n-1)}} \times 100$<br><br>Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Lumbang***

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Lumbang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Lumbang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

## B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Lumbang

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Lumbang dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Kecamatan Lumbang**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

***Sumber Data : Kecamatan Lumbang***

## C. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Lumbang

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Lumbang sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Lumbang :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Lumbang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Lumbang, sebagai berikut

**Tabel 3.3**

**Arah Kebijakan Kecamatan Lumbang**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Lumbang** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan public | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE Kerja |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE Kerja |
| | | | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | SAE Kerja |
| | | | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | SAE Kerja |

***Sumber Data : Kecamatan Lumbang***

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahun, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman,

ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

## Tabel 4.1

## Program Kecamatan Lumbang

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.797.545.325,64 | | 2.831.668.643,06 | | 2.873.932.413,93 | | 2.932.509.405,85 | | 3.001.273.531,73 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.681.649.325,64 | | 2.711.451.315,43 | | 2.751.860.645,99 | | 2.808.010.925,12 | | 2.873.855.698,3 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,00 | 72,04 | 72,07 | 2.681.649.325,64 | 72,11 | 2.711.451.315,43 | 72,14 | 2.751.860.645,99 | 72,18 | 2.808.010.925,12 | 72,22 | 2.873.855.698,3 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 44.500.000 | | 44.994.542,12 | | 45.665.105,27 | | 46.596.877,88 | | 47.689.523,52 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 44.500.000 | 100 | 44.994.542,12 | 100 | 45.665.105,27 | 100 | 46.596.877,88 | 100 | 47.689.523,52 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 7.600.000 | | 7.684.461,13 | | 7.798.984,27 | | 7.958.118,47 | | 8.144.727,61 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 7.600.000 | 100 | 7.684.461,13 | 100 | 7.798.984,27 | 100 | 7.958.118,47 | 100 | 8.144.727,61 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 58.516.000 | | 59.166.306,22 | | 60.048.074,15 | | 61.273.323,74 | | 62.710.115,91 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 58.516.000 | 100 | 59.166.306,22 | 100 | 60.048.074,15 | 100 | 61.273.323,74 | 100 | 62.710.115,91 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 5.280.000 | | 5.338.678,25 | | 5.418.241,7 | | 5.528.798,09 | | 5.658.442,34 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang | 100 | 100 | 100 | 5.280.000 | 100 | 5.338.678,25 | 100 | 5.418.241,7 | 100 | 5.528.798,09 | 100 | 5.658.442,34 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terlaksana Dengan Baik (%) | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 0 | | 3.033.339,91 | | 3.141.362,55 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.033.339,91 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.215.024,05 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2797545325.64 | | 2831668643.06 | | 2873932413.93 | | 2932509405.85 | | 3001273531.73 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lumbang

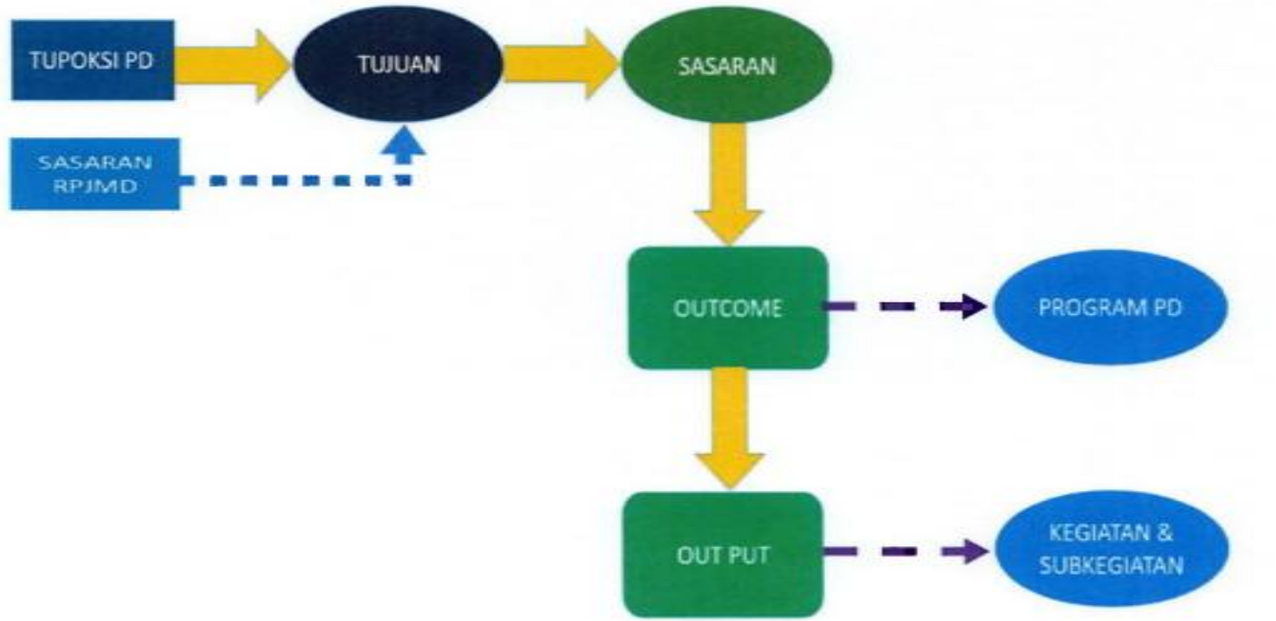

Tabel 4.2

## Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Lumbang

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Lumbang** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Prosentase dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terseusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Persentase laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | |
| | | | | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |
| | | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2.1**

**Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Lumbang**

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Lumbang***

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Lumbang**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.797.545.325,64 | | 2.831.668.643,06 | | 2.873.932.413,93 | | 2.932.509.405,85 | | 3.001.273.531,73 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.681.649.325,64 | | 2.711.451.315,43 | | 2.751.860.645,99 | | 2.808.010.925,12 | | 2.873.855.698,3 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,00 | 72,07 | 2.681.649.325,64 | 72,11 | 2.711.451.315,43 | 72,14 | 2.751.860.645,99 | 72,18 | 2.808.010.925,12 | 72,22 | 2.873.855.698,3 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Lumbang | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.000.000 | | 1.011.113 | | 1.026.182 | | 1.047.121 | | 1.071.674,69 | | |
| Prosentase dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terseusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | 7 | 1.000.000 | 7 | 1.011.113 | 7 | 1.026.182 | 7 | 1.047.121 | 7 | 1.071.674,69 | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1.000.000 | | 1.011.113 | | 1.026.182 | | 1.047.121 | | 1.071.674,69 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | 7 | 1.000.000 | 7 | 1.011.113 | 7 | 1.026.182 | 7 | 1.047.121 | 7 | 1.071.674,69 | | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.230.118.617,64 | | 2.254.902.608,46 | | 2.288.507.897,4 | | 2.335.203.705,71 | | 2.389.961.668,71 | | |
| Persentase laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | 2.230.118.617,64 | | 2.254.902.608,46 | | 2.288.507.897,4 | | 2.335.203.705,71 | 0 | 2.389.961.668,71 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 4 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.230.118.617,64 | | 2.254.902.608,46 | | 2.288.507.897,4 | | 2.335.203.705,71 | | 2.389.961.668,71 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 13 | 2.230.118.617,64 | 13 | 2.254.902.608,46 | 13 | 2.288.507.897,4 | 13 | 2.335.203.705,71 | 13 | 2.389.961.668,71 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 102.904.000 | | 104.047.604 | | 105.598.247 | | 107.752.924 | | 110.279.612 | | |
| Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | | 102.904.000 | | 104.047.604 | | 105.598.247 | | 107.752.924 | | 110.279.612 | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 8.648.000 | | 8.744.108 | | 8.874.423 | | 9.055.501 | | 9.267.843 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 2 | 8.648.000 | 2 | 8.744.108 | 2 | 8.874.423 | 2 | 9.055.501 | 2 | 9.267.843 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 1.300.000 | | 1.314.447 | | 1.334.037 | | 1.361.257 | | 1.393.177 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 3 | 4 | 1.300.000 | 4 | 1.314.447 | 4 | 1.334.037 | 4 | 1.361.257 | 4 | 1.393.177 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.940.000 | | 24.206.053 | | 24.566.800 | | 25.068.073 | | 25.655.892 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 12 | 23.940.000 | 12 | 24.206.053 | 12 | 24.566.800 | 12 | 25.068.073 | 12 | 25.655.892 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 69.016.000 | | 69.782.996 | | 70.822.987 | | 72.268.093 | | 73.962.700 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 1 | 69.016.000 | 1 | 69.782.996 | 1 | 70.822.987 | 1 | 72.268.093 | 1 | 73.962.700 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 342.426.708 | | 346.232.201 | | 351.392.172 | | 358.562.146 | | 366.970.034 | | |
| Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 342.426.708 | | 346.232.201 | | 351.392.172 | | 358.562.146 | | 366.970.034 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 48.369.300 | | 48.906.843 | | 49.635.712 | | 50.648.503 | | 51.836.154 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 48.369.300 | 12 | 48.906.843 | 12 | 49.635.712 | 12 | 50.648.503 | 12 | 51.836.154 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 294.057.408 | | 297.325.358 | | 301.756.460 | | 307.913.643 | | 315.133.880 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 294.057.408 | 12 | 297.325.358 | 12 | 301.756.460 | 12 | 307.913.643 | 12 | 315.133.880 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 5.200.000 | | 5.257.788,97 | | 5.336.147,59 | | 5.445.028,41 | | 5.572.708,9 | | |
| Persentase pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | 5.200.000 | | 5.257.788,97 | | 5.336.147,59 | | 5.445.028,41 | | 5.572.708,9 | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 9 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 5.200.000 | | 5.257.788,97 | | 5.336.147,59 | | 5.445.028,41 | | 5.572.708,9 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 9 | 10 | 5.200.000 | 10 | 5.257.788,97 | 10 | 5.336.147,59 | 10 | 5.445.028,41 | 10 | 5.572.708,9 | | |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 44.500.000 | | 44.994.542,12 | | 45.665.105,27 | | 46.596.877,88 | | 47.689.523,52 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan public | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 44.500.000 | 100 | 44.994.542,12 | 100 | 45.665.105,27 | 100 | 46.596.877,88 | 100 | 47.689.523,52 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Lumbang | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 41.500.000 | | 41.961.202,2 | | 42.586.558,85 | | 43.455.515,33 | | 44.474.499,46 | | |
| Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | 41.500.000 | | 41.961.202,2 | | 42.586.558,85 | | 43.455.515,33 | | 44.474.499,46 | | |
| | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 5 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 41.500.000 | | 41.961.202,2 | | 42.586.558,85 | | 43.455.515,33 | | 44.474.499,46 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 5 | 3 | 41.500.000 | 3 | 41.961.202,2 | 3 | 42.586.558,85 | 3 | 43.455.515,33 | 3 | 44.474.499,46 | | |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |

| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 3.000.000 | | 3.033.339,92 | | 3.078.546,42 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,06 | | |
| Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | | | 3.000.000 | | 3.033.339,92 | | 3.078.546,42 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,06 | | |
| | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 5 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | 3.000.000 | | 3.033.339,92 | | 3.078.546,42 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,06 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 5 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.033.339,92 | 4 | 3.078.546,42 | 4 | 3.141.362,55 | 4 | 3.215.024,06 | | |
| 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 7.600.000 | | 7.684.461,13 | | 7.798.984,27 | | 7.958.118,47 | | 8.144.727,61 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 7.600.000 | 100 | 7.684.461,13 | 100 | 7.798.984,27 | 100 | 7.958.118,47 | 100 | 8.144.727,61 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Lumbang | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 7.600.000 | | 7.684.461,13 | | 7.798.984,27 | | 7.958.118,47 | | 8.144.727,61 | | |
| Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | 7 | 7.600.000 | 7 | 7.684.461,13 | 7 | 7.798.984,27 | 7 | 7.958.118,47 | 7 | 8.144.727,61 | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 7.600.000 | | 7.684.461,13 | | 7.798.984,27 | | 7.958.118,47 | | 8.144.727,61 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | 7 | 7.600.000 | 7 | 7.684.461,13 | 7 | 7.798.984,27 | 7 | 7.958.118,47 | 7 | 8.144.727,61 | | |
| 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT** | **INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT** | **BASELINE TAHUN 2024** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |
| | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | | |
| | | | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 58.516.000 | | 59.166.306,22 | | 60.048.074,15 | | 61.273.323,74 | | 62.710.115,91 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 58.516.000 | 100 | 59.166.306,22 | 100 | 60.048.074,15 | 100 | 61.273.323,74 | 100 | 62.710.115,91 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Lumbang | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 58.516.000 | | 59.166.306,22 | | 60.048.074,15 | | 61.273.323,74 | | 62.710.115,91 | | |
| Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | 58.516.000 | | 59.166.306,22 | | 60.048.074,15 | | 61.273.323,74 | | 62.710.115,91 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 58.516.000 | | 59.166.306,22 | | 60.048.074,15 | | 61.273.323,74 | | 62.710.115,91 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | 58.516.000 | 14 | 59.166.306,22 | 14 | 60.048.074,15 | 14 | 61.273.323,74 | 14 | 62.710.115,91 | | |
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 5.280.000 | | 5.338.678,25 | | 5.418.241,7 | | 5.528.798,09 | | 5.658.442,34 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 5.280.000 | 100 | 5.338.678,25 | 100 | 5.418.241,7 | 100 | 5.528.798,09 | 100 | 5.658.442,34 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Lumbang | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 5.280.000 | | 5.338.678,25 | | 5.418.241,7 | | 5.528.798,09 | | 5.658.442,34 | | |
| Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 1 | 1 | 5.280.000 | 1 | 5.338.678,25 | 1 | 5.418.241,7 | 1 | 5.528.798,09 | 1 | 5.658.442,34 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 20 | 1.332 | | 1.332 | | 1.332 | | 1.332 | | 1.332 | | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 4.080.000 | | 4.125.342,29 | | 4.186.823,14 | | 4.272.253,07 | | 4.372.432,72 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 20 | 1.332 | 4.080.000 | 1.332 | 4.125.342,29 | 1.332 | 4.186.823,14 | 1.332 | 4.272.253,07 | 1.332 | 4.372.432,72 | | |
| 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 1.200.000 | | 1.213.335,96 | | 1.231.418,56 | | 1.256.545,02 | | 1.286.009,62 | | |
| Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 1 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.213.335,96 | 1 | 1.231.418,56 | 1 | 1.256.545,02 | 1 | 1.286.009,62 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 0 | | 3.033.339,91 | | 3.141.362,55 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.033.339,91 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.215.024,05 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Lumbang | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 0 | | 3.033.339,91 | | 3.141.362,55 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |
| Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 10 | 2 | 0 | 2 | 3.033.339,91 | 2 | 3.141.362,55 | 2 | 3.141.362,55 | 2 | 3.215.024,05 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 6 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 10 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 10 | 2 | 0 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 0 | | 1.033.339,91 | | 1.141.362,55 | | 1.141.362,55 | | 1.215.024,05 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 10 | 2 | 0 | 2 | 1.033.339,91 | 2 | 1.141.362,55 | 2 | 1.141.362,55 | 2 | 1.215.024,05 | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas. Penetapannya berlandaskan pada isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kemampuan pendanaan daerah. Secara eksplisit, Program Prioritas Kecamatan Lumbang dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Lumbang** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan public | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE Kerja |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE Kerja |
| | | | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | SAE Kerja |
| | | | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | SAE Kerja |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lumbang sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lumbang**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Lumbang | | | | | | | | | |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 91,00 | |
| 3 | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 92,15 | 93,07 | 94 | 94,94 | 95,89 | 96,85 | 97,82 | |
| 4 | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Lumbang sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Lumbang**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | | | | | | | | | | |
| | **NIHIL** | | | | | | | | | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Lumbang.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Lumbang.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## a. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Lumbang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Lumbang.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

**b. Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Lumbang. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;

2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;
3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

Plt. CAMAT LUMBANG
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN LUMBANG

**AGUS SETIJONO, S.Sos**
Pembina Tingkat I
NIP. 19680814 198809 1 001

Pemerintah Kabupaten
Probolinggo

# RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN MARON

**TAHUN 2025- 2029**

**PREPARED BY :**
KECAMATAN MARON

**Pemerintah Daerah**
**Kabupaten Probolinggo**

Kecamatan Maron

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maron Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Maron Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Maron. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Maron. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Maron dan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 23 September 2025

Plt. CAMAT MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO

**WINDA PERMATA ERIANTI S.STP. M.Si**
Pembina
NIP : 19841124 200212 2 002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 7
1.4 Sistematika Penulisan ..... 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MARON ..... 11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Maron ..... 11
2.2 Sumber Daya Kecamatan Maron ..... 20
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Maron ..... 24
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 29
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Maron ..... 29
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Maron ..... 31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 36
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Maron Tahun 2025-2029 ..... 36
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Maron dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 27
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 45
4.1 Uraian Program ..... 45
4.2 Uraian Kegiatan ..... 49
BAB V PENUTUP ..... 74
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 74
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 75

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan

Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Maron

Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Maron

Table 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Maron

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Maron

Tabel 4.1 Program Kecamatan Maron Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Maron

Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Maron

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dn Pendanaan

Tabel 4.4 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Uatama Kecamatan Maron

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Maron

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Maron

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Maron menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maron setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Maron juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Maron. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Maron berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Maron terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan

berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maron yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Maron untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Maron berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Maron dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Maron disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Maron akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Maron dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Maron untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Maron berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta Pembangunan wilayah melalui Perencanaan yang sistematis.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MARON

Bab II memuat:

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Maron

2.2 Sumber Daya Kecamatan Maron

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Maron

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Kuripan

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Maron

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Maron Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Maron dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Maron 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Maron; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MARON

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Maron

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Maron Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
    a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
    b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
    c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
    e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi
    a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
    b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
    c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
    d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
    e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
    f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
    g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
    h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;

f. Penyusunan laporanpertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi
e. Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

7. **KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong,

pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;

e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan

mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Maron**

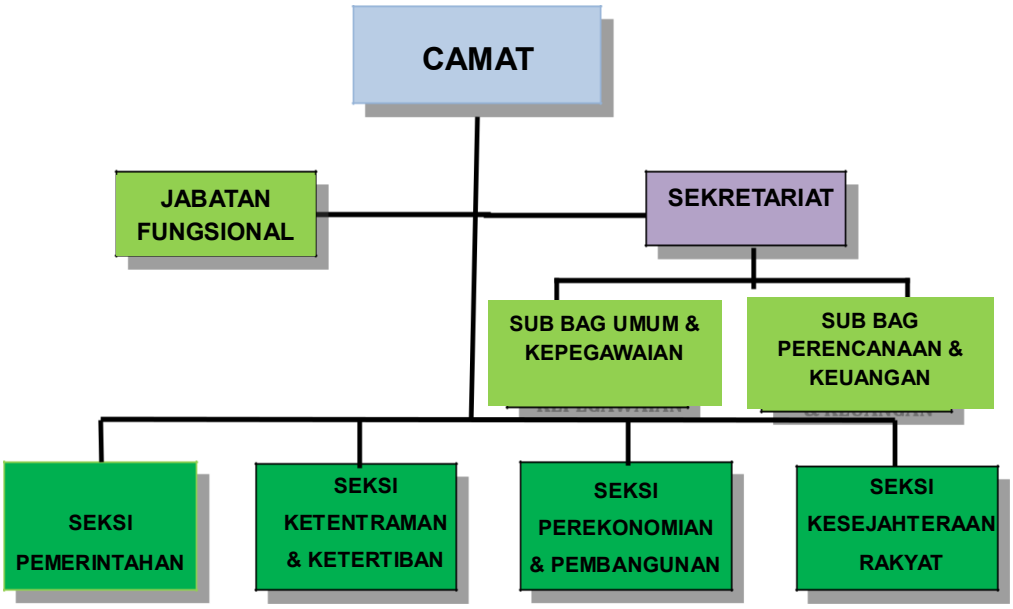


Struktur Organisasi Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
3. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
4. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
5. Kepala Seksi Pemerintahan;
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
8. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Maron

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Maron.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Maron sebanyak 22 orang dengan rincian : Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 13 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1 orang yang terdiri dari perempuan. Jumlah Pegawai Non ASN sebanyak 8 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Maron berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | **4** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | **4** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | **3** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | **2** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | **3** |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **6** | **0** | **10** | **3** | **11** | **8** | **19** |

***Sumber data : Kecamatan Maron***

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan**

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 1 | 4 | - | - | 4 | **9** | 1 | - | 4 | 4 | **9** |
| 2. | Perempuan | - | 2 | 3 | - | 1 | 4 | **10** | 1 | - | 5 | 4 | **10** |
| **Jumlah** | | **-** | **3** | **7** | **-** | **1** | **8** | **19** | **2** | **-** | **9** | **8** | **19** |

***Sumber data : Kecamatan Maron***

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.3**

**Jumlah Sarana Prasarana**

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|---|---|---|
| **A** | **ALAT BANTU** | **2** |
| | **ELECTRIC GENERATING SET** | **2** |
| | Portable Generating Set | **1** |
| | **POMPA** | 2 |
| | Pompa Air | 1 |
| **B** | **ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR** | **8** |
| | **KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN** | **1** |
| | Sport Utility Vehicle (SUV) | 1 |
| | **KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA** | **7** |
| | Sepeda Motor | 7 |

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|---|---|---|
| | **ALAT UKUR** | **1** |
| **C** | **UNIVERSAL TESTER** | **1** |
| | Scanner (Universal Tester) | 1 |
| **D** | **ALAT KANTOR** | **23** |
| | **ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR** | **16** |
| | Lemari Besi/Metal | 7 |
| | Lemari Kayu | 1 |
| | Rak Kayu | 1 |
| | Filing Cabinet Besi | 2 |
| | Brandkas | 2 |
| | Lemari Kaca | 3 |
| | **ALAT KANTOR LAINNYA** | **7** |
| | Papan Visual/Papan Nama | 1 |
| | Alat Penghancur Kertas | 1 |
| | Mesin Absensi | 2 |
| | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 1 |
| | Brand Kas | 2 |
| **E** | **ALAT RUMAH TANGGA** | **229** |
| | **MEUBELAIR** | **209** |
| | Meja Kerja Kayu | 9 |
| | Kursi Besi/Metal | 60 |
| | Kursi Kayu | 1 |
| | Meja Rapat | 12 |
| | Tempat Tidur Kayu | 3 |
| | Meja Resepsionis | 1 |
| | Meja 1/2 Biro | 2 |
| | Meja Makan Besi | 1 |
| | Kursi Fiber Glas/Plastik | 38 |
| | Kursi Rapat | 65 |
| | Kursi Tamu | 4 |
| | Bangku Tunggu | 1 |
| | Kursi Lipat | 10 |
| | Meja Komputer | 2 |
| | **ALAT PEMBERSIH** | **1** |
| | Mesin Pemotong Rumput | 1 |
| | **ALAT PENDINGIN** | **16** |
| | Lemari Es | 1 |
| | A.C. Window | 15 |
| | **ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)** | **3** |
| | Televisi | 2 |

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|---|---|---|
| | Loudspeaker | 1 |
| **D** | **MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT** | **38** |
| | **MEJA KERJA PEJABAT** | **1** |
| | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 |
| | **MEJA RAPAT PEJABAT** | **1** |
| | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III | 1 |
| | **KURSI KERJA PEJABAT** | **31** |
| | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 3 |
| | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 14 |
| | Kursi Kerja | 14 |
| | **KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT** | **1** |
| | Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 1 |
| | **LEMARI DAN ARSIP PEJABAT** | **4** |
| | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 3 |
| | Buffet Kaca | 1 |
| **E** | **ALAT STUDIO** | **2** |
| | **PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM** | **2** |
| | Printer | 2 |
| **F** | **ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH** | **2** |
| | **ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN** | **2** |
| | Lain-lain Alat Peraga Bidang Studi Keterampilan | 2 |
| **G** | **KOMPUTER UNIT** | **16** |
| | **PERSONAL KOMPUTER** | **16** |
| | P.C Unit | 3 |
| | Lap Top | 13 |
| **H** | **PERALATAN KOMPUTER** | **11** |
| | **PERALATAN MAINFRAME** | **1** |
| | Hard Disk | 1 |
| | **PERALATAN MINI KOMPUTER** | **3** |
| | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 1 |
| | Printer | 2 |
| | **PERALATAN PERSONAL KOMPUTER** | **7** |
| | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 6 |
| | Hard disk Eksternal | 1 |
| **I** | **ALAT KERJA PENERBANGAN** | **1** |
| | **PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA** | **1** |
| | Genset | 1 |
| **TOTAL** | | **334** |

***Sumber Data : Kecamatan Maron***

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Maron

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Maron yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Maron telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Maron dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah "Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah, Religius serta Eksis Berdaya Saing)." Adapun pengertian visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan visi sebagai daerah yang sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)

Tujuan 1: Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif dengan indikator sasaran berupa Indeks kepuasan Masyarakat.

Target dan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.1 sebagai berikut :

**Table 2.3.1**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 81,02 | 82,37 | 85,63 | - | - | 81,02 | 82,37 | 85,63 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 74,56 | 100 | 99,00 | - | - | 74,56 | 100,00 | 99,00 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 0,00 | 97,6 | 87,03 | - | - | 0,00 | 97,60 | 87,03 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | - | - | - | - | 100 | | | - | - | 82,00 | - | - | - | - | 82,00 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | - | - | 80 | 80 | 74 | | | 71,80 | 72,25 | 72,41 | - | - | 89,75 | 90,31 | 97,85 |

***Sumber Data : Kecamatan Maron***

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | - | **2.757.962.869,00** | **2.890.250.953,00** | - | - | - | **2.492.467.687,00** | **2.488.916.798,00** | - | - | - | **90,37** | **86,11** | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | - | 3.000.100,00 | 11.940.000,00 | - | - | - | 360.000,00 | 7.210.000,00 | - | - | - | 12,00 | 60,39 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | | 430.000,00 | - | | | | | - | - | - | - | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | | 430.000,00 | 5.400.000,00 | | | | | 4.140.000,00 | - | - | - | 0,00 | 76,67 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | | 430.000,00 | - | | | | | - | - | - | - | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | | 850.700,00 | - | | | | | - | - | - | - | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | | | - | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | | 430.000,00 | 3.640.000,00 | | | | | 800.000,00 | - | - | - | 0,00 | 21,98 | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | 429.400,00 | 2.900.000,00 | | | | 360.000,00 | 2.270.000,00 | - | - | - | 83,84 | 78,28 | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | - | 2.521.065.844,00 | 2.351.633.598,00 | - | - | - | 2.361.328.897,00 | 2.044.497.091,00 | - | - | - | 93,66 | 86,94 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | | 2.282.709.000,00 | 2.314.083.598,00 | - | - | | 2.123.952.053,00 | 2.031.777.091,00 | - | - | - | 93,05 | 87,80 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | | 237.376.844,00 | 33.400.000,00 | - | - | | 237.376.844,00 | 12.720.000,00 | - | - | - | 100,00 | 38,08 | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | | | | - | - | | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | | 490.000,00 | 1.200.000,00 | - | - | | | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | - | | 490.000,00 | | - | - | | | | - | - | - | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | | | 1.600.000,00 | - | - | | | | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | | | 1.350.000,00 | - | - | | | | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 86.433.200,00 | 38.731.300,00 | - | - | - | 37.851.000,00 | 37.036.500,00 | - | - | - | 43,79 | 95,62 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | | 7.078.000,00 | 4.320.000,00 | - | - | | 6.772.000,00 | 4.080.000,00 | - | - | - | 95,68 | 94,44 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | | 40.031.700,00 | | - | - | | | | - | - | - | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | | 4.767.800,00 | 6.128.300,00 | - | - | | 4.560.000,00 | 5.604.500,00 | - | - | - | 95,64 | 91,45 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | - | | 30.000.000,00 | 22.610.000,00 | - | - | | 25.214.500,00 | 21.771.000,00 | - | - | - | 84,05 | 96,29 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | - | | 1.659.800,00 | 5.673.000,00 | - | - | | 1.304.500,00 | 5.581.000,00 | - | - | - | 78,59 | 98,38 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | | 2.895.900,00 | | - | - | | | | - | - | - | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | | | | - | - | | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 123.843.725,00 | 360.431.155,00 | - | - | - | 70.078.490,00 | 285.909.907,00 | - | - | - | 56,59 | 79,32 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | | 1.190.000,00 | 1.848.000,00 | - | - | | 1.040.000,00 | 1.815.000,00 | - | - | - | 87,39 | 98,21 | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | | 54.739.725,00 | 48.093.300,00 | | - | | 36.364.368,00 | 38.668.534,00 | - | - | - | 66,43 | 80,40 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | | 19.000.000,00 | 48.013.550,00 | | - | | 400.000,00 | 26.350.100,00 | - | - | - | 2,11 | 54,88 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | | 48.914.000,00 | 262.476.305,00 | | - | | 32.274.122,00 | 219.076.273,00 | - | - | - | 65,98 | 83,47 | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 86.342.000,00 | | | | | 84.550.000,00 | | | | | | | |
| Pengadaan Mebel | | | | | 32.994.000,00 | | | | | 32.000.000,00 | | | | | | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 53.348.000,00 | | | | | 52.550.000,00 | | | | | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 23.620.000,00 | 41.172.900,00 | - | - | - | 22.849.300,00 | 29.713.300,00 | - | - | - | 96,74 | 72,17 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | | 5.600.000,00 | 7.000.000,00 | | - | | 4.873.300,00 | 1.698.300,00 | - | - | - | 87,02 | 24,26 | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 13.772.900,00 | | | | | 8.450.000,00 | | | | | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | | 18.020.000,00 | 20.400.000,00 | | - | | 17.976.000,00 | 19.565.000,00 | - | - | - | 99,76 | 95,91 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | **-** | **38.100.000,00** | **35.300.000,00** | **-** | **-** | **-** | **16.407.500,00** | **17.700.000,00** | **-** | **-** | **-** | **43,06** | **50,14** | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | - | 33.200.000,00 | 17.800.000,00 | - | - | - | 13.850.000,00 | 16.600.000,00 | - | - | - | 41,72 | 93,26 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | - | | 33.200.000,00 | 17.800.000,00 | - | - | | 13.850.000,00 | 16.600.000,00 | - | - | - | 41,72 | 93,26 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | | - | - | | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | - | 4.900.000,00 | 17.500.000,00 | - | - | - | 2.557.500,00 | 1.100.000,00 | - | - | - | 52,19 | 6,29 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | - | - | | 4.900.000,00 | 17.500.000,00 | - | - | | 2.557.500,00 | 1.100.000,00 | - | - | - | 52,19 | 6,29 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | - | | | | - | - | | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | **-** | **412.850.000,00** | **78.388.800,00** | **-** | **-** | **-** | **342.902.000,00** | **31.776.000,00** | **-** | **-** | **-** | **83,06** | **40,54** | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | - | 362.850.000,00 | 44.487.000,00 | - | - | - | 342.902.000,00 | 24.423.000,00 | - | - | - | 94,50 | 54,90 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | | 351.600.000,00 | 27.987.000,00 | - | - | | 338.222.000,00 | 17.278.000,00 | - | - | - | 96,20 | 61,74 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | - | | 11.250.000,00 | 16.500.000,00 | - | - | | 4.680.000,00 | 7.145.000,00 | - | - | - | 41,60 | 43,30 | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | | 50.000.000,00 | | - | - | | | | - | - | - | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | 33.901.800,00 | - | - | - | - | 7.353.000,00 | - | - | - | #DIV/0! | 21,69 | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | | | 14.221.800,00 | - | - | | | 3.168.000,00 | - | - | - | #DIV/0! | 22,28 | | |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 19.680.000,00 | | | | | 4.185.000,00 | | | | | | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | **-** | **26.233.575,00** | **67.498.000,00** | **-** | **-** | **-** | **15.488.800,00** | **63.653.000,00** | **-** | **-** | **-** | **59,04** | **94,30** | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | - | 26.233.575,00 | 67.498.000,00 | - | - | - | 15.488.800,00 | 63.653.000,00 | - | - | - | 59,04 | 94,30 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | | 26.233.575,00 | 52.538.000,00 | - | - | | 15.488.800,00 | 51.563.000,00 | - | - | - | 59,04 | 98,14 | | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | | | 14.960.000,00 | - | - | | | 12.090.000,00 | - | - | - | #DIV/0! | 80,82 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | **-** | **65.840.000,00** | **100.020.000,00** | **-** | **-** | **-** | **52.695.000,00** | **86.725.000,00** | **-** | **-** | **-** | **80,03** | **86,71** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | - | 65.840.000,00 | 100.020.000,00 | - | - | - | 52.695.000,00 | 86.725.000,00 | - | - | - | 80,03 | 86,71 | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | - | | 65.840.000,00 | 90.220.000,00 | - | - | | 52.695.000,00 | 80.345.000,00 | - | - | - | 80,03 | 89,05 | | |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | 9.800.000,00 | | | | | 6.380.000,00 | | | | | | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **14.400.000,00** | | | | | **6.825.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **47,40** | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | 14.400.000,00 | | | | | 6.825.000,00 | - | - | - | - | **47,40** | | |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | 7.200.000,00 | | | | | 1.950.000,00 | - | - | - | - | **27,08** | | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | 7.200.000,00 | | | | | 4.875.000,00 | - | - | - | - | 67,71 | | |
| **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | **3.300.986.444,00** | **3.185.857.753,00** | **-** | **-** | **-** | **2.919.960.987,00** | **2.695.595.798,00** | - | - | - | **88,46** | **84,61** | | |

***Sumber Data: Kecamatan Maron***

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah Kecamatan Maron :

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Maron

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan :

- **Keterbatasan Sumber Daya :** Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur :** Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat

menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.

- **Birokrasi yang Kaku :** Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.
- **Akses dan Kesenjangan Digital :** Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah :** Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital :** Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar-Sektor :** Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur :** Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu :** Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan

mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.

- **Penguatan Partisipasi Masyarakat :** Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Maron

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Maron adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

**Tabel 2.2.2**

**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Maron**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti kawasan pertanian dan perkebunan | Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br><br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim yang terjadi di Kecamatan Maron Desa Brabe, Desa Satreyan dan Desa Brani Kulon | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, serta kehutanan | Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Kualitas tata kelola pemerintahan belum | Tata Kelola dan Pelayanan | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi | Penguatan reformasi politik, | Peningkatan tata kelola pemerintahan | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mencapai tingkat optimal | Pemerintah yang belum Optimal | stabilitas global dan akses pendanaan. | hukum, dan birokrasi. | dan kepemimpinan yang baik. | yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

***Sumber Data : Kecamatan Maron***

# BAB III

# TUJUAAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarki dan sistematis. Visi menjadi arah utama Pembangunan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perecanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Maron Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Maron 2025-2029

Tujuan dalam Rensta Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indicator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Maron Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, salah satunya yaitu layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan Maron menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Mewujudkan transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif dengan indicator sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: “SAE PEMERINTAH : Mencipatakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Maron, dalam hal ini Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten

menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan,sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ”Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;
2. “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

**Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Maron**

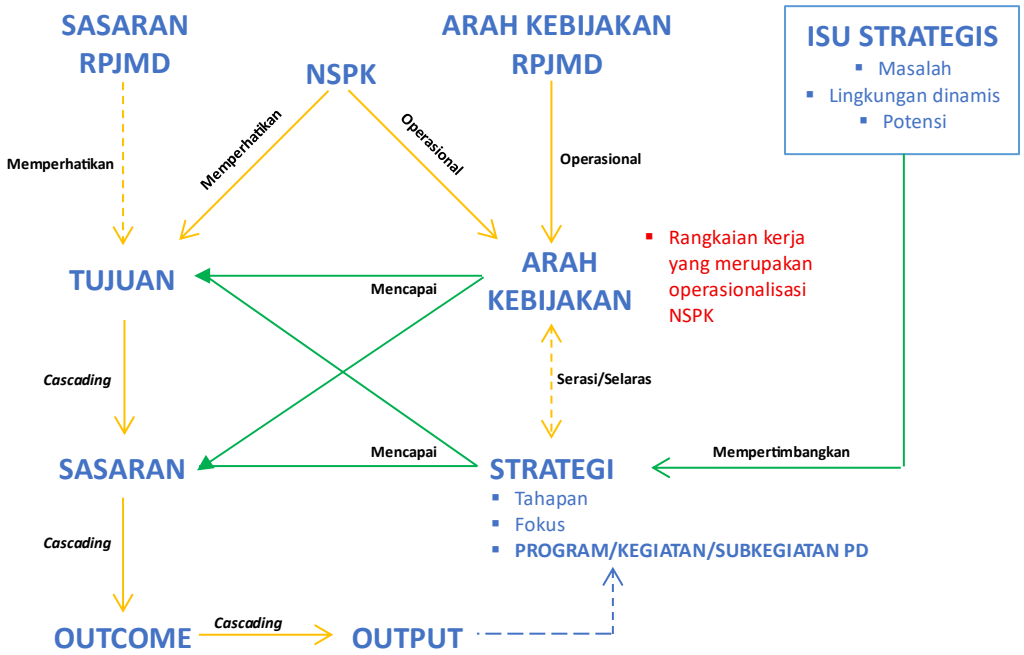

RPJMD merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah jangka menengah 5 (lima) tahun yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi, Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, dan Program Prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Maron yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

**Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**

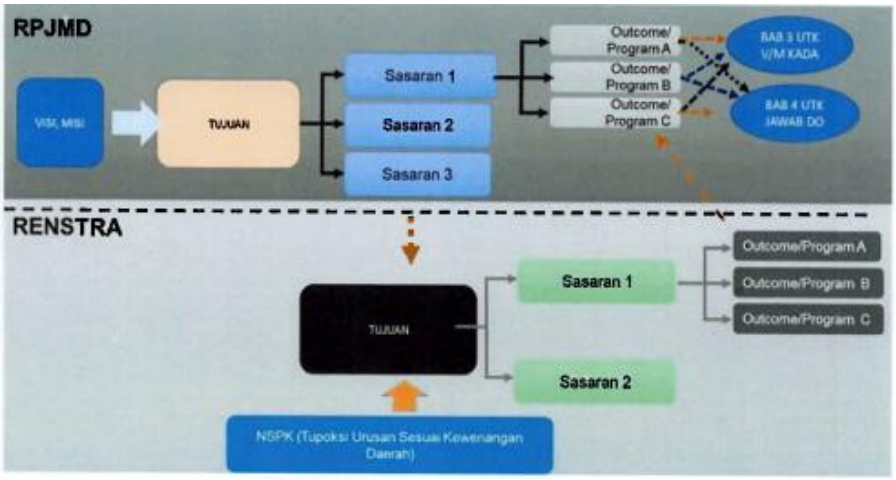


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.1**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Maron**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Maron** | | | | | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 86,59 | 87,46 | 88,33 | 89,21 | 90,11 | 91,01 | 91,92 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2029 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun Pembangunan dan menggunakan caapaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, diperlukan Misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Maron

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

**Tabel 3.1.2**

**Definisi Operasional IKU Kecamatan Maron**

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut : $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| 3. | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai hasil atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | $\frac{\text{Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1)}}{\text{Nilai LHE AKIP tahun (n-1)}} \times 100$<br><br>Keterangan : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

***Sumber Data: Cascading Kecamatan Maron***

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Maron dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Maron dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

## B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Maron

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Maron dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Table 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Maron**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan prublik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

***Sumber Data : Kecamatan Maron***

## C. Lokasi Fokus (Lokus) renstra Kecamatan Maron

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Maron sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Maron :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;

3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;

4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Maron dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan startegi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki focus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan focus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Maron sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Maron**

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul; | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

***Sumber data : Kecamatan Maron***

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Menyusun Renstra Kecamatan Maron, salah satu bagian kunci Adalah Menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelennggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasional rencana startegis ke dalam bentuk Tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Maron ditentukan program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan maron Adalah sebagai berikut.

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

   Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui

peningkatan pengetahun, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada table dibawah ini:

# TABEL 4.1

# PROGRAM KECAMATAN MARON

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.820.609.669,05 | | 2.851.955.967,66 | | 2.894.459.268,68 | | 2.953.519.198,22 | | 3.022.775.980,65 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.559.841.669,05 | | 2.588.289.973,07 | | 2.626.863.804,18 | | 2.680.463.588,04 | | 2.743.317.516,21 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,41 | 72,45 | 72,48 | 2.559.841.669,05 | 72,52 | 2.588.289.973,07 | 72,55 | 2.626.863.804,18 | 72,59 | 2.680.463.588,04 | 72,63 | 2.743.317.516,21 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 56.800.000 | | 57.431.235,79 | | 58.287.145,6 | | 59.476.464,36 | | 60.871.122,15 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 56.800.000 | 100 | 57.431.235,79 | 100 | 58.287.145,6 | 100 | 59.476.464,36 | 100 | 60.871.122,15 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 39.522.000 | | 39.961.220,08 | | 40.556.770,57 | | 41.384.310,29 | | 42.354.726,93 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 39.522.000 | 100 | 39.961.220,08 | 100 | 40.556.770,57 | 100 | 41.384.310,29 | 100 | 42.354.726,93 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 85.446.000 | | 86.395.587,55 | | 87.683.159,21 | | 89.472.288,27 | | 91.570.315,2 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 85.446.000 | 100 | 86.395.587,55 | 100 | 87.683.159,21 | 100 | 89.472.288,27 | 100 | 91.570.315,2 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 71.000.000 | | 71.789.044,73 | | 72.858.932 | | 74.345.580,45 | | 76.088.902,68 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang | 100 | 100 | 100 | 71.000.000 | 100 | 71.789.044,73 | 100 | 72.858.932 | 100 | 74.345.580,45 | 100 | 76.088.902,68 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terlaksana Dengan Baik (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 8.000.000 | | 8.088.906,44 | | 8.209.457,12 | | 8.376.966,81 | | 8.573.397,48 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.088.906,44 | 100 | 8.209.457,12 | 100 | 8.376.966,81 | 100 | 8.573.397,48 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2820609669.05 | | 2851955967.66 | | 2894459268.68 | | 2953519198.22 | | 3022775980.65 | |

***Sumber Data: SIPD Renstra***

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat Tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran startegis dalam suatu urusan pemerintahan, Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Maron Adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Resntra Kecamatan Maron merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indicator dan target kinerjanya. Sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Maronjuga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintah daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Maron serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Maron dijelaskan pada gamabra di bawah ini:

## Gambar 4.1

## Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sun Kegiatan Renstra Kecamatan Maron

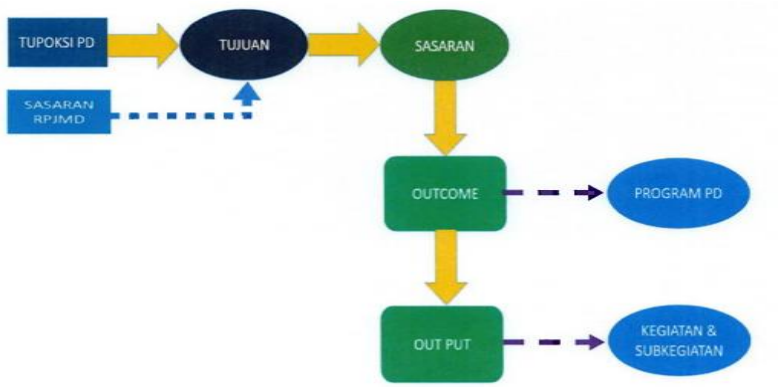


## Tabel 4.2

## Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Maron

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Maron** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah diantaranya penyediaan ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Telaksananya pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Persentase Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Peningkatan fasilitasi pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa/keluarahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

***Sumber Data: SIPD Renstra***

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Tabel 4.2.1

## Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Maron

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | |

***Sumber Data: Cascading Kecamata Maron***

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indicator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran opersional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan Pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut:

# Tabel 4.3

## Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Maron

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.820.609.669,05 | | 2.851.955.967,66 | | 2.894.459.268,68 | | 2.953.519.198,22 | | 3.022.775.980,65 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.559.841.669,05 | | 2.588.289.973,07 | | 2.626.863.804,18 | | 2.680.463.588,04 | | 2.743.317.516,21 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,41 | 72,48 | 2.559.841.669,05 | 72,52 | 2.588.289.973,07 | 72,55 | 2.626.863.804,18 | 72,59 | 2.680.463.588,04 | 72,63 | 2.743.317.516,21 | 7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Maron | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5.000.000 | | 5.055.500 | | 5.130.826,95 | | 5.235.495,81 | | 5.358.006,41 | | |
| dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 7 | 5.000.000 | 7 | 5.055.500 | 7 | 5.130.826,95 | 7 | 5.235.495,81 | 7 | 5.358.006,41 | | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan | | | | 3.000.000 | | 3.033.300 | | 3.078.496,17 | | 3.141.297,49 | | 3.214.803,85 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 7 | 3.000.000 | 7 | 3.033.300 | 7 | 3.078.496,17 | 7 | 3.141.297,49 | 7 | 3.214.803,85 | | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1.000.000 | | 1.011.100 | | 1.026.165,39 | | 1.047.099,16 | | 1.071.601,28 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 8 | 1.000.000 | 8 | 1.011.100 | 8 | 1.026.165,39 | 8 | 1.047.099,16 | 8 | 1.071.601,28 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.000.000 | | 1.011.100 | | 1.026.165,39 | | 1.047.099,16 | | 1.071.601,28 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | 20 | 1.000.000 | 20 | 1.011.100 | 20 | 1.026.165,39 | 20 | 1.047.099,16 | 20 | 1.071.601,28 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.170.214.129,05 | | 2.194.337.567,38 | | 2.227.041.507,64 | | 2.272.484.916,61 | | 2.325.792.143,87 | | |
| tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 2.170.214.129,05 | 12 | 2.194.337.567,38 | 12 | 2.227.041.507,64 | 12 | 2.272.484.916,61 | 12 | 2.325.792.143,87 | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 204 | 196 | | 196 | | 196 | | 196 | | 196 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.145.488.129,05 | | 2.169.337.108,78 | | 2.201.668.542,21 | | 2.246.594.342,69 | | 2.299.295.730,53 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 204 | 196 | 2.145.488.129,05 | 196 | 2.169.337.108,78 | 196 | 2.201.668.542,21 | 196 | 2.246.594.342,69 | 196 | 2.299.295.730,53 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 21.726.000 | | 21.967.158,6 | | 22.294.469,26 | | 22.749.276,44 | | 23.281.609,5 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 21.726.000 | 12 | 21.967.158,6 | 12 | 22.294.469,26 | 12 | 22.749.276,44 | 12 | 23.281.609,5 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1.000.000 | | 1.011.100 | | 1.026.165,39 | | 1.047.099,16 | | 1.071.601,28 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 5 | 1.000.000 | 5 | 1.011.100 | 5 | 1.026.165,39 | 5 | 1.047.099,16 | 5 | 1.071.601,28 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 1.000.000 | | 1.011.100 | | 1.026.165,39 | | 1.047.099,16 | | 1.071.601,28 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | 48 | 1.000.000 | 48 | 1.011.100 | 48 | 1.026.165,39 | 48 | 1.047.099,16 | 48 | 1.071.601,28 | | |
| 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1.000.000 | | 1.011.100 | | 1.026.165,39 | | 1.047.099,16 | | 1.071.601,28 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.011.100 | 1 | 1.026.165,39 | 1 | 1.047.099,16 | 1 | 1.071.601,28 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 52.663.500 | | 53.248.064,85 | | 54.041.461,02 | | 55.143.906,82 | | 56.434.274,24 | | |
| Tersedianya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | 52.663.500 | | 53.248.064,85 | | 54.041.461,02 | | 55.143.906,82 | | 56.434.274,24 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.776.400 | | 3.818.318,04 | | 3.875.210,98 | | 3.954.265,28 | | 4.046.795,09 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | 3.776.400 | 2 | 3.818.318,04 | 2 | 3.875.210,98 | 2 | 3.954.265,28 | 2 | 4.046.795,09 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 2.144.300 | | 2.168.101,73 | | 2.200.406,45 | | 2.245.294,74 | | 2.297.834,63 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 2.144.300 | 4 | 2.168.101,73 | 4 | 2.200.406,45 | 4 | 2.245.294,74 | 4 | 2.297.834,63 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 39.900.000 | | 40.342.890 | | 40.943.999,06 | | 41.779.256,64 | | 42.756.891,25 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 39.900.000 | 12 | 40.342.890 | 12 | 40.943.999,06 | 12 | 41.779.256,64 | 12 | 42.756.891,25 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang | | | | 6.842.800 | | 6.918.755,08 | | 7.021.844,53 | | 7.165.090,16 | | 7.332.753,27 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 6.842.800 | 12 | 6.918.755,08 | 12 | 7.021.844,53 | 12 | 7.165.090,16 | 12 | 7.332.753,27 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 281.434.040 | | 284.557.957,84 | | 288.797.871,41 | | 294.689.348,04 | | 301.585.078,78 | | |
| Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah diantaranya penyediaan ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 12 | 281.434.040 | 12 | 284.557.957,84 | 12 | 288.797.871,41 | 12 | 294.689.348,04 | 12 | 301.585.078,78 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 8.531.500 | | 8.626.199,65 | | 8.754.730,02 | | 8.933.326,52 | | 9.142.366,36 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 12 | 8.531.500 | 12 | 8.626.199,65 | 12 | 8.754.730,02 | 12 | 8.933.326,52 | 12 | 9.142.366,36 | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 49.710.000 | | 50.261.781 | | 51.010.681,54 | | 52.051.299,44 | | 53.269.299,85 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 49.710.000 | 12 | 50.261.781 | 12 | 51.010.681,54 | 12 | 52.051.299,44 | 12 | 53.269.299,85 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.781.000 | | 2.811.869,1 | | 2.853.765,95 | | 2.911.982,78 | | 2.980.123,17 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 2.781.000 | 12 | 2.811.869,1 | 12 | 2.853.765,95 | 12 | 2.911.982,78 | 12 | 2.980.123,17 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 220.411.540 | | 222.858.108,09 | | 226.178.693,9 | | 230.792.739,3 | | 236.193.289,4 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 220.411.540 | 12 | 222.858.108,09 | 12 | 226.178.693,9 | 12 | 230.792.739,3 | 12 | 236.193.289,4 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 50.530.000 | | 51.090.883 | | 51.852.137,16 | | 52.909.920,76 | | 54.148.012,91 | | |
| Telaksananya pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | 6 | 50.530.000 | 6 | 51.090.883 | 6 | 51.852.137,16 | 6 | 52.909.920,76 | 6 | 54.148.012,91 | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 27.000.000 | | 27.299.700 | | 27.706.465,53 | | 28.271.677,43 | | 28.933.234,68 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | 9 | 27.000.000 | 9 | 27.299.700 | 9 | 27.706.465,53 | 9 | 28.271.677,43 | 9 | 28.933.234,68 | | |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.680.000 | | 5.743.048 | | 5.828.619,42 | | 5.947.523,25 | | 6.086.695,3 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | 4 | 5.680.000 | 4 | 5.743.048 | 4 | 5.828.619,42 | 4 | 5.947.523,25 | 4 | 6.086.695,3 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 17.850.000 | | 18.048.135 | | 18.317.052,21 | | 18.690.720,08 | | 19.128.082,93 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 3 | 17.850.000 | 3 | 18.048.135 | 3 | 18.317.052,21 | 3 | 18.690.720,08 | 3 | 19.128.082,93 | | |
| 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 56.800.000 | | 57.431.235,79 | | 58.287.145,6 | | 59.476.464,36 | | 60.871.122,15 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 56.800.000 | 100 | 57.431.235,79 | 100 | 58.287.145,6 | 100 | 59.476.464,36 | 100 | 60.871.122,15 | 7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Maron | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 50.800.000 | | 51.364.635,79 | | 52.130.153,26 | | 53.193.869,38 | | 54.441.514,44 | | |
| Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 6 | 9 | 50.800.000 | 9 | 51.364.635,79 | | 52.130.153,26 | 9 | 53.193.869,38 | 9 | 54.441.514,44 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 50.800.000 | | 51.364.635,79 | | 52.130.153,26 | | 53.193.869,38 | | 54.441.514,44 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 6 | 9 | 50.800.000 | 9 | 51.364.635,79 | | 52.130.153,26 | 9 | 53.193.869,38 | 9 | 54.441.514,44 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 6.000.000 | | 6.066.600 | | 6.156.992,34 | | 6.282.594,98 | | 6.429.607,71 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Persentase Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 4 | 6 | 6.000.000 | 6 | 6.066.600 | 6 | 6.156.992,34 | 6 | 6.282.594,98 | 6 | 6.429.607,71 | | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | 6.000.000 | | 6.066.600 | | 6.156.992,34 | | 6.282.594,98 | | 6.429.607,71 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 4 | 6 | 6.000.000 | 6 | 6.066.600 | 6 | 6.156.992,34 | 6 | 6.282.594,98 | 6 | 6.429.607,71 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 39.522.000 | | 39.961.220,08 | | 40.556.770,57 | | 41.384.310,29 | | 42.354.726,93 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 39.522.000 | 100 | 39.961.220,08 | 100 | 40.556.770,57 | 100 | 41.384.310,29 | 100 | 42.354.726,93 | 7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Maron | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 31.522.000 | | 31.872.420,08 | | 32.347.447,45 | | 33.007.516,97 | | 33.781.916,65 | | |
| Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 8 | 8 | 31.522.000 | 8 | 31.872.420,08 | 8 | 32.347.447,45 | 8 | 33.007.516,97 | 8 | 33.781.916,65 | | |
| | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 23.522.000 | | 23.783.620,08 | | 24.138.124,33 | | 24.630.723,66 | | 25.209.106,37 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 8 | 8 | 23.522.000 | 8 | 23.783.620,08 | 8 | 24.138.124,33 | 8 | 24.630.723,66 | 8 | 25.209.106,37 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 8.000.000 | | 8.088.800 | | 8.209.323,12 | | 8.376.793,31 | | 8.572.810,28 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 12 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.088.800 | 12 | 8.209.323,12 | 12 | 8.376.793,31 | 12 | 8.572.810,28 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 8.000.000 | | 8.088.800 | | 8.209.323,12 | | 8.376.793,32 | | 8.572.810,28 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Persentase Peningkatan fasilitasi pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 225 | 150 | 8.000.000 | 150 | 8.088.800 | 150 | 8.209.323,12 | 150 | 8.376.793,32 | 150 | 8.572.810,28 | | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 160 | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 4.000.000 | | 4.044.400 | | 4.104.661,56 | | 4.188.396,66 | | 4.286.405,14 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 225 | 150 | 4.000.000 | 150 | 4.044.400 | 150 | 4.104.661,56 | 150 | 4.188.396,66 | 150 | 4.286.405,14 | | |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 4.000.000 | | 4.044.400 | | 4.104.661,56 | | 4.188.396,66 | | 4.286.405,14 | | |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 160 | 120 | 4.000.000 | 120 | 4.044.400 | 120 | 4.104.661,56 | 120 | 4.188.396,66 | 120 | 4.286.405,14 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 85.446.000 | | 86.395.587,55 | | 87.683.159,21 | | 89.472.288,27 | | 91.570.315,2 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 85.446.000 | 100 | 86.395.587,55 | 100 | 87.683.159,21 | 100 | 89.472.288,27 | 100 | 91.570.315,2 | 7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Maron | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 85.446.000 | | 86.395.587,55 | | 87.683.159,21 | | 89.472.288,27 | | 91.570.315,2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | 14 | 85.446.000 | 14 | 86.395.587,55 | 14 | 87.683.159,21 | 14 | 89.472.288,27 | 14 | 91.570.315,2 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 85.446.000 | | 86.395.587,55 | | 87.683.159,21 | | 89.472.288,27 | | 91.570.315,2 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | 14 | 85.446.000 | 14 | 86.395.587,55 | 14 | 87.683.159,21 | 14 | 89.472.288,27 | 14 | 91.570.315,2 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 71.000.000 | | 71.789.044,73 | | 72.858.932 | | 74.345.580,45 | | 76.088.902,68 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 71.000.000 | 100 | 71.789.044,73 | 100 | 72.858.932 | 100 | 74.345.580,45 | 100 | 76.088.902,68 | 7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Maron | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 71.000.000 | | 71.789.044,73 | | 72.858.932 | | 74.345.580,45 | | 76.088.902,68 | | |
| Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 650 | 892 | 71.000.000 | 892 | 71.789.044,73 | 892 | 72.858.932 | 892 | 74.345.580,45 | 892 | 76.088.902,68 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 71.000.000 | | 71.789.044,73 | | 72.858.932 | | 74.345.580,45 | | 76.088.902,68 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 650 | 892 | 71.000.000 | 892 | 71.789.044,73 | 892 | 72.858.932 | 892 | 74.345.580,45 | 892 | 76.088.902,68 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 8.000.000 | | 8.088.906,44 | | 8.209.457,12 | | 8.376.966,81 | | 8.573.397,48 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.088.906,44 | 100 | 8.209.457,12 | 100 | 8.376.966,81 | 100 | 8.573.397,48 | 7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Maron | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 8.000.000 | | 8.088.906,44 | | 8.209.457,12 | | 8.376.966,81 | | 8.573.397,48 | | |
| Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa/keluarahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 12 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.088.906,44 | 12 | 8.209.457,12 | 12 | 8.376.966,81 | 12 | 8.573.397,48 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 4.000.000 | | 4.044.506,44 | | 4.104.795,56 | | 4.188.570,16 | | 4.286.992,34 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 12 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.044.506,44 | 12 | 4.104.795,56 | 12 | 4.188.570,16 | 12 | 4.286.992,34 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 4.000.000 | | 4.044.400 | | 4.104.661,56 | | 4.188.396,65 | | 4.286.405,14 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 12 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.044.400 | 12 | 4.104.661,56 | 12 | 4.188.396,65 | 12 | 4.286.405,14 | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau opersional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas Pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Kecamatan tidak terdapat program prioritas dikarenakan Kecamatan sebagai fasilitator dari Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam mendukung terlaksananya program prioritas tersebut.

**Tabel 4.4**

**Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Maron** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE KERJS |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE KERJS |
| | | | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | SAE KERJS |
| | | | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | SAE KERJS |

***Sumber data: SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemrintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuandan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengkur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indicator Kinerja Utama Kecamatan Maron sebagaimana dijelaskan pada table dibawah ini:

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Uatama Kecamatan Maron**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Maron | | | | | | | | | |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 91,00 | |
| 3 | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 4. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 86,59 | 87,46 | 88,33 | 89,21 | 90,11 | 91,01 | 91,92 | |

***Sumber data: Kecamatan Maron***

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Adalah ukuran keberhasilan yang berdsifat operasional dan digunakan menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan maron sebagaimana dijelaskan pada table dibawah ini:

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | | | | | | | | | | |
| | **NIHIL** | | | | | | | | | | |

***Sumber data: Kecamatan Maron***

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Maron.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Maron.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Maron bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Maron.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara

rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Maron. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;
2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;
3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

Plt. CAMAT MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO

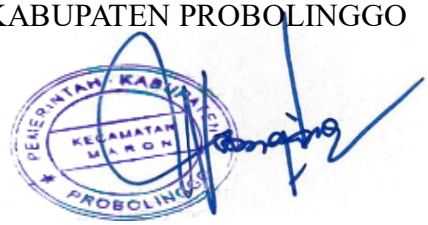


**WINDA PERMATA ERIANTI S.STP. M.Si**
Pembina
NIP : 19841124 200212 2 002

# RENCANA STRATEGIS

# ( RENSTRA )

# KECAMATAN PAITON

# TAHUN 2025-2029

**KECAMATAN PAITON**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paiton Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Paiton Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Paiton. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Paiton. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Paiton dengan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

Paiton,  Agustus 2025

**CAMAT PAITON**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**Drs. IMAM SYAFI'I, M.Si.**
Pembina Tingkat 1
NIP. 19691206 200312 1 004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4
1.4 Sistematika Penulisan ..... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 8
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Paiton..... 8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Paiton..... 8
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Paiton..... 15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Paiton..... 19
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 20
2.2 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Paiton..... 20
2.2.1 Permasalahan Kecamatan Paiton..... 20
2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Paiton..... 21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 23
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ..... 23
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ..... 24
3.3 Strategi Kecamatan Paitondalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 28
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Paitondalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 29
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 31
4.1 Uraian Program ..... 31
4.2 Uraian Kegiatan ..... 35
BAB V PENUTUP ..... 68

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.1.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..……..…. 16
Tabel 2.1.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ……..…… 17
Tabel 2.1.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..…... 17
Tabel 2.2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Paiton……..… 22
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 26
Tabel 3.3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan PaitonTahun 2025-2029 27
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Paiton……..... 29
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Kecamatan Paiton…… 30
Tabel 4.1 Program Kecamatan Paiton……. 33
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Paiton……. 36
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Paiton……. 50
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… 66
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paiton…….. 66
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Paiton…… 67

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Paiton……..…….…. 15
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo ..…. 24
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah …… 25
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Paiton……. 36

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Paiton menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paiton setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Paiton juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Paiton. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Paiton berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Paiton terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paiton yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Paiton untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Paiton berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Paiton dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Paiton disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Paiton akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Paiton dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Paiton untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Paiton berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum (diganti angka yang a,b,c) sesuaikan denga RPJMD

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

   12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan
    Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta Pembangunan wilayah melalui Perencanaan yang sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAITON**

Bab II memuat :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Paiton

2.2 Sumber Daya Kecamatan Paiton

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Paiton

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Paiton

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Paiton

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Paiton Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Paiton dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Paiton 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paiton; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Paiton

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Paiton

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Paiton Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;

b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. K**

**EPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;

2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;

b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Paiton**

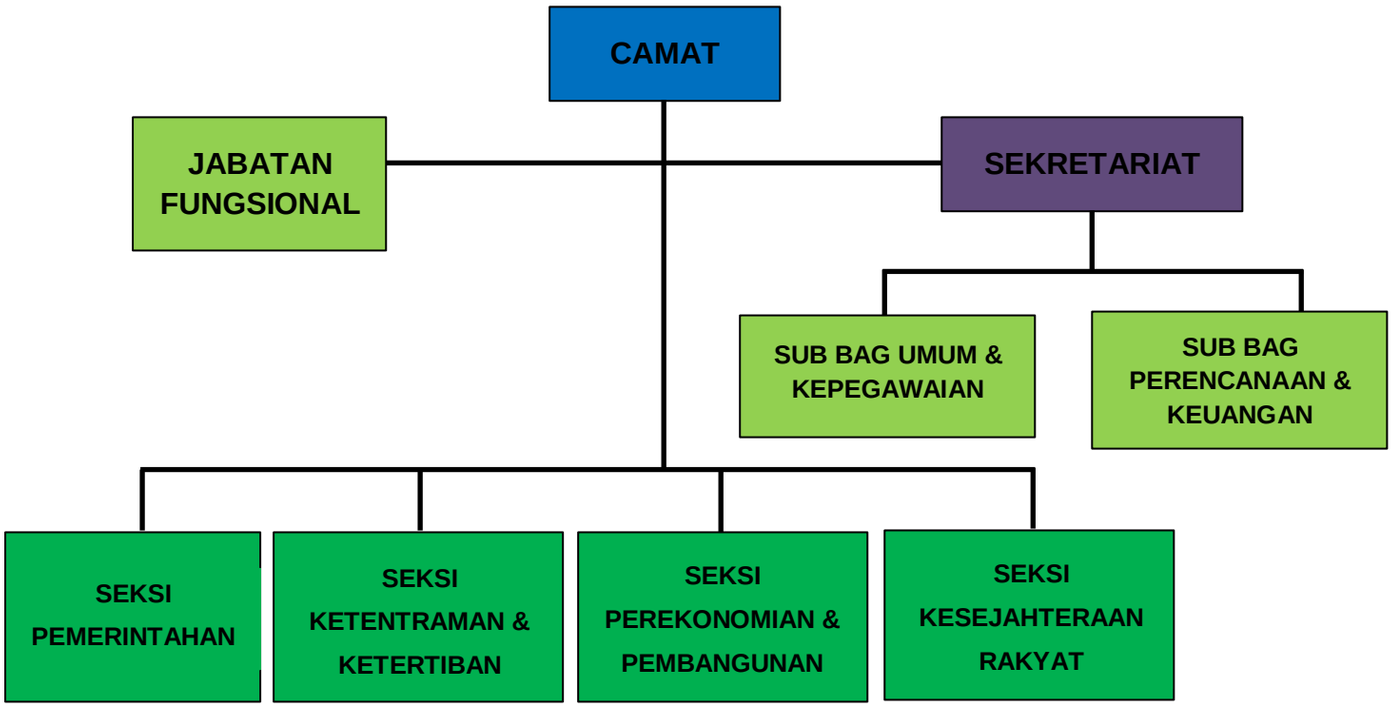


Struktur Organisasi Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Paiton

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Paiton.

Dalam menjalankan pemerintahan danaparatur

sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Paiton sebanyak 15 orang dengan rincian : Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 13 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah Pegawai Non ASN sebanyak 8 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Paiton berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | **3** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | **3** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| 10. | Honorer | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | **8** |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **5** | **0** | **11** | **3** | **15** | **8** | **23** |

***Sumber Data : Kecamatan Paiton***

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | **15** | 2 | 2 | 7 | 4 | **15** |
| 2. | Perempuan | - | - | 3 | - | 1 | 4 | **8** | - | 1 | 3 | 4 | **8** |
| **Jumlah** | | **-** | **5** | **6** | **2** | **2** | **8** | **23** | **2** | **3** | **10** | **8** | **23** |

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.2.3

Jumlah Sarana Prasarana

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak Berat (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobil Dinas | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Sepeda Motor Suzuki | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Sepeda Motor Kawasaki | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Lemari Besi / Metal | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Brandkas | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Genset | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Lemari Arsip | 2 | 2 | 0 |
| 8 | AC | 10 | 10 | 0 |
| 9 | Lemari Es | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Televisi | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Sound System | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Mimbar / Podium | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Penghancur Kertas | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Mesin Absensi | 2 | 2 | 0 |
| 15 | LCD Prjector | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Kursi Kayu | 4 | 4 | 0 |
| 17 | Kursi Rapat | 65 | 65 | 0 |
| 18 | Kursi Tamu | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Kursi Putar | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Bangku Tunggu | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Kursi Lipat | 36 | 36 | 0 |
| | | | | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Kursi Kerja | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Meja Kerja Kayu | 14 | 14 | 0 |
| 25 | Meja Rapat | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Tempat Tidur Besi | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Meja Panjang | 5 | 5 | 0 |
| 28 | Lain – Lain Meja Kerja Pejabat | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Mesin Pemotong Rumput | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Kompor Gas | 2 | 2 | 0 |
| 31 | Regulator (Lain – Lain Alat Dapur) | 2 | 2 | 0 |
| 32 | Microphone/ Wireles Mic | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Layar Film / Projektor | 1 | 1 | 0 |
| 34 | PC Unit | 7 | 7 | 0 |
| 35 | Laptop | 11 | 11 | 0 |
| 36 | Scanner | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Printer | 14 | 14 | 0 |
| 38 | Internet | 3 | 3 | 0 |
| 39 | Meteran Listrik Listrik | 2 | 2 | 0 |

***Sumber Data : Kecamatan Paiton***

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Paiton

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Paitonyang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Paitontelah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Paitondapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing”.*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya

ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

**Tabel 2.13**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | - | - | - | 64,42 | 62,64 | 62,70 | 62,75 | 62,86 | 63,4 | 64,17 | 60,38 | 64,14 | 61,56 | 98,42% | 102,44% | 96,30% | 102,22% | 97,93% |
| 2 | Indeks Kualitas Air | - | - | - | 50,00 | 49,85 | 49,90 | 49,95 | 49,80 | 50 | 50,77 | 38,89 | 47,78 | 36,25 | 100,00% | 101,85% | 77,94% | 95,66% | 72,79% |
| 3 | Indeks Kualitas Udara | - | - | - | 83,00 | 79,13 | 79,22 | 79,31 | 79,38 | 80,18 | 80,71 | 82,82 | 83,64 | 92,88 | 96,60% | 102,00% | 104,54% | 105,46% | 117,01% |
| 4 | Indeks Kualitas Lahan | - | - | - | 54,84 | 54,11 | 54,11 | 54,12 | 54,75 | 55,38 | 56,58 | 55,79 | 56,15 | 54,82 | 100,98% | 104,56% | 103,10% | 103,75% | 1,001% |
| 5 | Persentase Pengelolaan Persampahan | | | | - | - | 10,00 | 15,00 | 23,00 | - | - | 10 | 19 | 28,90 | | | 100,00% | 126,67% | 125,65% |

**Tabel 2.14**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| Uraian Nama Program | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | Anggaran | Realisasi |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.174.243.200 | | | | - | 3.984.062.549 | | | | - | 95,44% | - | - | - | - | | |
| Program Pengelolaan Persampahan | 9.110.199.000 | | | | - | 8.587.044.383 | | | | - | 94,26% | - | - | - | - | | |
| Program Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup | 253.043.000 | | | | - | 221.599.934 | | | | - | 87,57% | - | - | - | - | | |
| Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup | 1.114.355.000 | | | | - | 1.051.384.285 | | | | - | 94,35% | - | - | - | - | | |
| Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | 253.650.000 | | | | - | 243.087.011 | | | | - | 95,84% | - | - | - | - | | |
| Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Lingkungan Hidup | 900.295.000 | | | | - | 762.934.900 | | | | - | 84,74% | - | - | - | - | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | 13.506.297.134 | 14.298.060.956 | 15.674.985.564 | 16.591.919.408 | | 13.163.962.529 | 9.728.361.428 | 15.005.501.210 | 15.855.201.434 | - | 97,47% | 68,04% | 95,73% | 95,56% | | |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN | | | 30.000.000 | 335.000.000 | 60.000.000 | | | 12.755.430 | 331.166.600 | 58.879.250 | - | - | 42,52% | 98,86% | 98,13% | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | 555.000.000 | 1.482.750.000 | 1.092.500.000 | 505.500.000 | | 546.236.300 | 79.254.395 | 869.206.809 | 434.383.316 | - | 98,42% | 5,35% | 79,56% | 85,93% | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | 846.060.000 | 425.250.000 | 210.250.000 | 304.364.700 | | 665.625.907 | 192.280.815 | 202.220.500 | 272.338.706 | - | 78,67% | 45,22% | 96,18% | 89,48% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) | | 22.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | | 21.922.350 | 2.503.600 | 8.445.000 | 14.660.800 | - | 99,65% | 35,77% | 84,45% | 97,74% | | |
| Uraian Nama Program | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | Anggaran | Realisasi |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | 111.500.000 | 40.000.000 | 65.000.000 | 60.000.000 | | 95.143.780 | 23.772.950 | 64.374.050 | 49.509.500 | - | 85,33% | 59,43% | 99,04% | 82,52% | | |
| PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | | | 20.500.000 | 10.000.000 | 1.175.000 | | | 1.370.000 | 9.625.000 | 400.000 | - | - | 6,68% | 96,25% | 34,04% | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | 50.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 100.000.000 | | 49.815.900 | 17.563.868 | 41.807.000 | 86.407.100 | - | 99,63% | 58,55% | 92,90% | 86,41% | | |
| PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | 40.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 35.500.000 | | 38.557.300 | 4.798.450 | 18.731.000 | 34.733.500 | - | 96,39% | 47,98% | 93,66% | 97,84% | | |
| Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | | 26.500.000 | 23.500.000 | 25.000.000 | 15.000.000 | | 19.242.450 | 11.122.400 | 24.506.000 | 14.266.000 | - | 72,61% | 47,33% | 98,02% | 95,11% | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | 1.708.892.250 | 1.771.050.000 | 3.311.140.000 | 1.957.500.000 | | 1.498.787.990 | 1.377.981.626 | 3.290.223.671 | 1.809.613.736 | - | 87,71% | 77,81% | 99,37% | 92,45% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JUMLAH** | **15.805.785.201** | **16.866.249.386** | **18.138.110.959** | **20.798.875.568** | **19.645.959.113** | **14.850.113.063** | **16.099.294.508** | **11.451.764.965** | **19.865.806.844** | **18.630.393.347** | **93,95%** | **95,45%** | **63,14%** | **95,51%** | **94,83%** | | |

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah kecamatan Paiton:

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Paiton

### 2.2.1 Permasalahan Kecamatan Paiton

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal.
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal.
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi.
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal.
5. Kualitas sumber daya manusia masih tergolong rendah.

### 2.2.1 Isu Strategis Kecamatan Paiton

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Paitonadalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

**Tabel 2.2**

**Isu Strategis Kecamatan Paiton**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi seperti kawasan Pegunungan | Belum optimalnya penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal untuk kesejahteraan dan konservasi | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, Kehutanan. Pariwisata berbasis alam | Masih tingginya angka kemiskinan dan ketergantungan | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Paiton, dalam hal ini Kecamatan Paitondiharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1

Konsep Renstra Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo

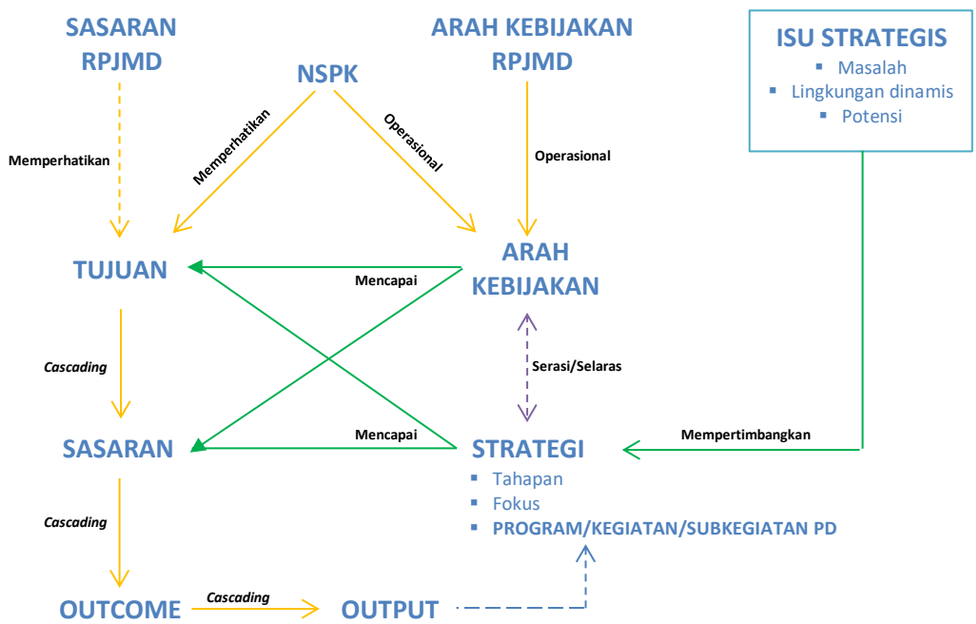


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

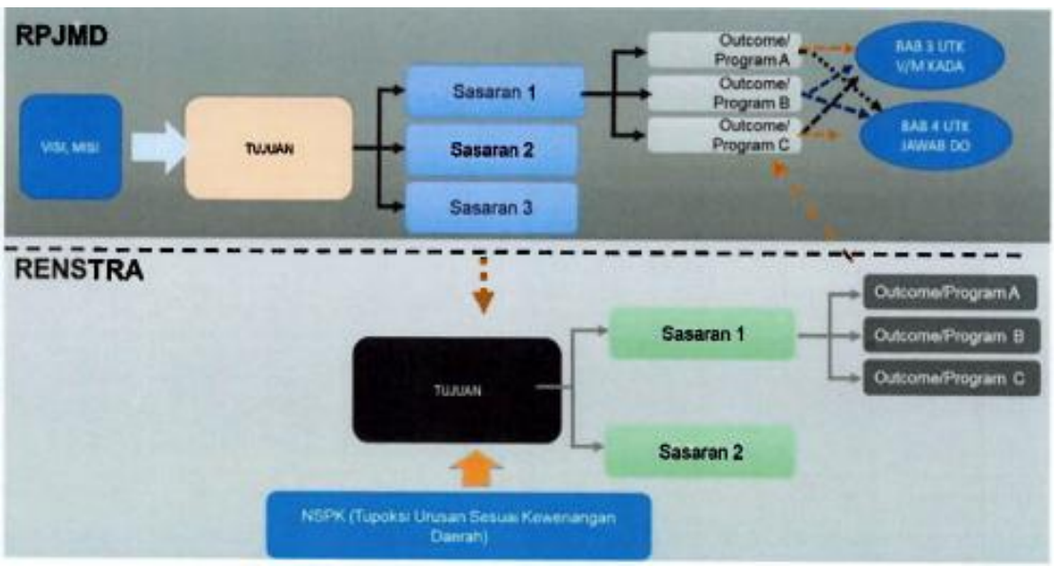


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Paiton

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Paiton** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 85,13 | 85,98 | 86,84 | 87,71 | 88,59 | 89,47 | 90,37 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 89,83 | 90,73 | 91,64 | 92,55 | 93,48 | 94,41 | 95,36 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam **Perencanaan Pembangunan Daerah**. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan **Visi**, diperlukan **Misi**, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam **Strategi Pembangunan**, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam **Arah Kebijakan**, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan

keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan Masyarakat

**Tabel 3.2.2**

**Tujuan dan Sasaran Renstra**

**Kecamatan PaitonTahun 2025-2029**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VISI : **TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO SAE, SEJAHTERA, AMANAH RELIGIUS SERTA EXSIS BERDAYA SAING** | | | | |
| MISI 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif | | | | |
| **TUJUAN / INDIKATOR** | **SASARAN / INDIKATOR** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif<br><br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah<br>Indikator :<br>Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah<br>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan | Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan` | 1 | Penguatan Sistem Perencanaan dan pengukuran Kinerja |
| | | | 2 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan |
| | | | 3 | Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| | | | 4 | Transparansi dan Pelibatan Publik |
| | | | 5 | Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan kecamatan | 1 | Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik |
| | | | 2 | Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi |
| | | | 3 | Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting |
| | | | 4 | Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran |
| | | Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat di kecamatan | 1 | Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses |
| | | | 2 | Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan |
| | | | 3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan |
| | | | 4 | Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik |
| | | | 5 | Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas |

## 3.3 Strategi Kecamatan Paiton dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian Lokus (Lokasi Fokus) dalam Renstra Kecamatan Paitonsangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Paiton:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra Kecamatan Paitondapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.4**

**Penahapan Renstra Kecamatan Paiton**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

## 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Paiton dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Paiton, sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

**Arah Kebijakan Kecamatan Paiton**

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolabor<br><br>atif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata<br><br>Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul; | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

***Sumber Data : Kecamatan Paiton***

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahun, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi

pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

# Tabel 4.1

## Program Kecamatan Paiton

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 3.248.146.508,36 | | 3.284.244.154,75 | | 3.333.189.937,74 | | 3.401.201.937,42 | | 3.480.956.388,55 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.997.779.808,36 | | 3.031.095.052,97 | | 3.076.268.101,54 | | 3.139.037.745,35 | | 3.212.644.734,02 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,21 | 72,93 | 73,66 | 2.997.779.808,36 | 74,40 | 3.031.095.052,97 | 75,14 | 3.076.268.101,54 | 75,89 | 3.139.037.745,35 | 76,65 | 3.212.644.734,02 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 36.371.900,00 | | 36.776.112,06 | | 37.324.194,21 | | 38.085.774,90 | | 38.978.844,50 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 36.371.900,00 | 100 | 36.776.112,06 | 100 | 37.324.194,21 | 100 | 38.085.774,90 | 100 | 38.978.844,50 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 37.600.000,00 | | 38.017.860,31 | | 38.584.448,50 | | 39.371.744,01 | | 40.294.968,18 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 37.600.000,00 | 100 | 38.017.860,31 | 100 | 38.584.448,50 | 100 | 39.371.744,01 | 100 | 40.294.968,18 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 86.394.800,00 | | 87.354.931,86 | | 88.656.800,82 | | 90.465.796,54 | | 92.587.120,14 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 86.394.800,00 | 100 | 87.354.931,86 | 100 | 88.656.800,82 | 100 | 90.465.796,54 | 100 | 92.587.120,14 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 69.000.000,00 | | 69.766.818,12 | | 70.806.567,71 | | 72.251.338,74 | | 73.945.553,31 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang | 100 | 100 | 100 | 69.000.000,00 | 100 | 69.766.818,12 | 100 | 70.806.567,71 | 100 | 72.251.338,74 | 100 | 73.945.553,31 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terlaksana Dengan Baik (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 21.000.000,00 | | 21.233.379,43 | | 21.549.824,96 | | 21.989.537,88 | | 22.505.168,40 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 21.000.000,00 | 100 | 21.233.379,43 | 100 | 21.549.824,96 | 100 | 21.989.537,88 | 100 | 22.505.168,40 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 3.248.146.508,36 | | 3.284.244.154,75 | | 3.333.189.937,74 | | 3.401.201.937,42 | | 3.480.956.388,55 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;s
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
15. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan PaitonKabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sun Kegiatan Renstra Kecamatan Paiton

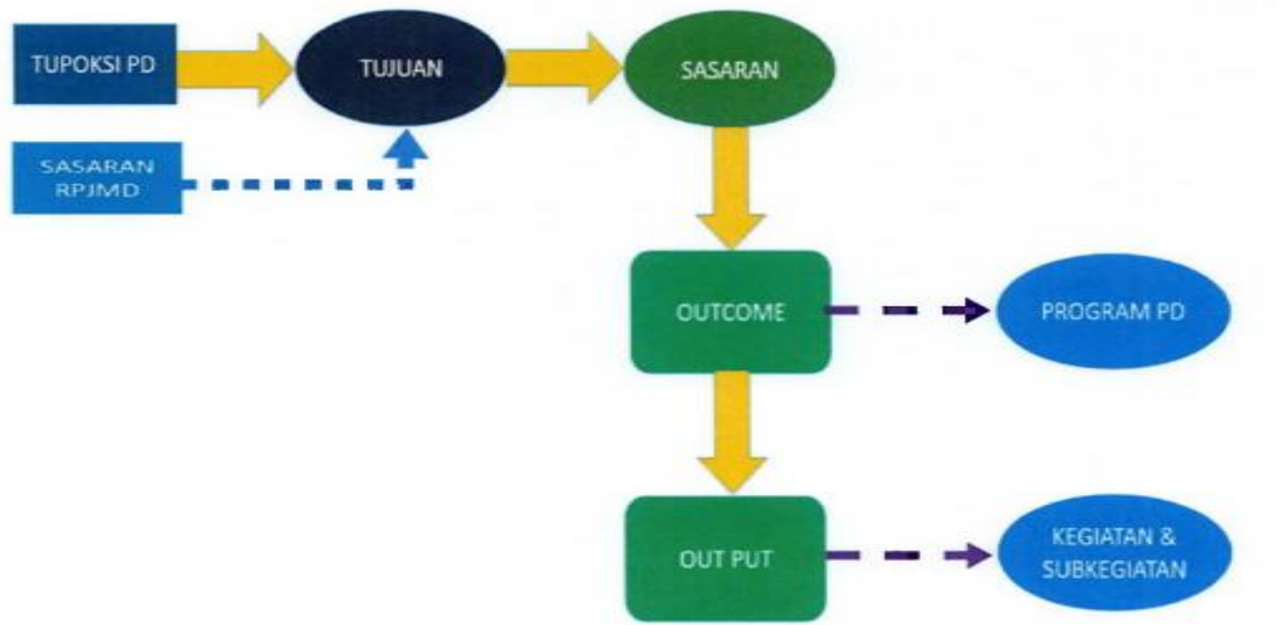

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Paiton

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Paiton** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan | | | Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara berkualitas (%) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik selama satu tahun | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Perekonomian Masyarakat di Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik selama satu tahun | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | |
| | | | | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut :

# Tabel 4.3

## Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Paiton

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 3.248.146.508,36 | | 3.284.244.154,75 | | 3.333.189.937,74 | | 3.401.201.937,42 | | 3.480.956.388,55 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.997.779.808,36 | | 3.031.095.052,97 | | 3.076.268.101,54 | | 3.139.037.745,35 | | 3.212.644.734,02 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,21 | 73,66 | 2.997.779.808,36 | 74,40 | 3.031.095.052,97 | 75,14 | 3.076.268.101,54 | 75,89 | 3.139.037.745,35 | 76,65 | 3.212.644.734,02 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Paiton | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 55.055.000,00 | | 60.560.500,00 | | 66.616.550,00 | | 73.278.205,00 | | 80.606.026,00 | | |
| Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 3 | 3 | 55.055.000,00 | 3 | 60.560.500,00 | 3 | 66.616.550,00 | 3 | 73.278.205,00 | 3 | 80.606.026,00 | | |
| | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 49.005.000,00 | | 53.905.500,00 | | 59.296.050,00 | | 65.225.655,00 | | 71.748.221,00 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 4 | 49.005.000,00 | 4 | 53.905.500,00 | 4 | 59.296.050,00 | 4 | 65.225.655,00 | 4 | 71.748.221,00 | | |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1.650.000,00 | | 1.815.000,00 | | 1.996.500,00 | | 2.196.150,00 | | 2.415.765,00 | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 3 | 3 | 1.650.000,00 | 3 | 1.815.000,00 | 3 | 1.996.500,00 | 3 | 2.196.150,00 | 3 | 2.415.765,00 | | |
| 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1.650.000,00 | | 1.815.000,00 | | 1.996.500,00 | | 2.196.150,00 | | 2.415.765,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 3 | 3 | 1.650.000,00 | 3 | 1.815.000,00 | 3 | 1.996.500,00 | 3 | 2.196.150,00 | 3 | 2.415.765,00 | | |
| 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | 1.100.000,00 | | 1.210.000,00 | | 1.331.000,00 | | 1.464.100,00 | | 1.610.510,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 3 | 3 | 1.100.000,00 | 3 | 1.210.000,00 | 3 | 1.331.000,00 | 3 | 1.464.100,00 | 3 | 1.610.510,00 | | |
| 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | 1.650.000,00 | | 1.815.000,00 | | 1.996.500,00 | | 2.196.150,00 | | 2.415.765,00 | | |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 3 | 3 | 1.650.000,00 | 3 | 1.815.000,00 | 3 | 1.996.500,00 | 3 | 2.196.150,00 | 3 | 2.415.765,00 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.332.387.335,36 | | 2.300.492.077,97 | | 2.278.877.343,54 | | 2.268.180.426,35 | | 2.260.974.197,02 | | |
| Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.330.157.327,36 | | 2.298.039.068,97 | | 2.276.179.033,54 | | 2.265.212.285,35 | | 2.257.709.242,02 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1 | 1 | 2.330.157.327,36 | 1 | 2.298.039.068,97 | 1 | 2.276.179.033,54 | 1 | 2.265.212.285,35 | 1 | 2.257.709.242,02 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1.130.008,00 | | 1.243.009,00 | | 1.367.310,00 | | 1.504.041,00 | | 1.654.445,00 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 2 | 1.130.008,00 | 2 | 1.243.009,00 | 2 | 1.367.310,00 | 2 | 1.504.041,00 | 3 | 1.654.445,00 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 1.100.000,00 | | 1.210.000,00 | | 1.331.000,00 | | 1.464.100,00 | | 1.610.510,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 2 | 2 | 1.100.000,00 | 2 | 1.210.000,00 | 2 | 1.331.000,00 | 2 | 1.464.100,00 | 2 | 1.610.510,00 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 86.167.510,00 | | 93.455.516,00 | | 96.528.553,00 | | 99.908.894,00 | | 103.627.269,00 | | |
| Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 86.167.510,00 | 1 | 93.455.516,00 | 1 | 96.528.553,00 | 1 | 99.908.894,00 | 1 | 103.627.269,00 | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.911.700,00 | | 3.202.870,00 | | 3.523.157,00 | | 3.875.473,00 | | 4.263.020,00 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 3 | 2.911.700,00 | 3 | 3.202.870,00 | 3 | 3.523.157,00 | 3 | 3.875.473,00 | 3 | 4.263.020,00 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 13.287.450,00 | | 13.287.450,00 | | 13.287.450,00 | | 13.287.450,00 | | 13.287.450,00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 13.287.450,00 | 2 | 13.287.450,00 | 2 | 13.287.450,00 | 2 | 13.287.450,00 | 2 | 13.287.450,00 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.772.520,00 | | 11.849.772,00 | | 13.034.749,00 | | 14.338.224,00 | | 15.772.047,00 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 10.772.520,00 | 1 | 11.849.772,00 | 1 | 13.034.749,00 | 1 | 14.338.224,00 | 1 | 15.772.047,00 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 44.943.360,00 | | 49.437.696,00 | | 49.437.696,00 | | 49.437.696,00 | | 49.437.696,00 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 44.943.360,00 | 12 | 49.437.696,00 | 12 | 49.437.696,00 | 12 | 49.437.696,00 | 12 | 49.437.696,00 | | |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat | | | | 14.252.480,00 | | 15.677.728,00 | | 17.245.501,00 | | 18.970.051,00 | | 20.867.056,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | 12 | 14.252.480,00 | 12 | 15.677.728,00 | 12 | 17.245.501,00 | 12 | 18.970.051,00 | 12 | 20.867.056,00 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 22.405.900,00 | | 24.646.490,00 | | 27.111.139,00 | | 29.822.253,00 | | 32.804.478,00 | | |
| Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 4 | 22.405.900,00 | 4 | 24.646.490,00 | 4 | 27.111.139,00 | 4 | 29.822.253,00 | 4 | 32.804.478,00 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 22.405.900,00 | | 24.646.490,00 | | 27.111.139,00 | | 29.822.253,00 | | 32.804.478,00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 4 | 22.405.900,00 | 4 | 24.646.490,00 | 4 | 27.111.139,00 | 4 | 29.822.253,00 | 4 | 32.804.478,00 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 444.729.063,00 | | 489.201.969,00 | | 538.122.166,00 | | 591.934.382,00 | | 651.127.820,00 | | |
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 13 | 13 | 444.729.063,00 | 13 | 489.201.969,00 | 13 | 538.122.166,00 | 13 | 591.934.382,00 | 13 | 651.127.820,00 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.456.400,00 | | 1.602.040,00 | | 1.762.244,00 | | 1.938.468,00 | | 2.132.315,00 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | 1 | 1.456.400,00 | 1 | 1.602.040,00 | 1 | 1.762.244,00 | 1 | 1.938.468,00 | 1 | 2.132.315,00 | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 45.182.390,00 | | 49.700.629,00 | | 54.670.692,00 | | 60.137.761,00 | | 66.151.537,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 45.182.390,00 | 12 | 49.700.629,00 | 12 | 54.670.692,00 | 12 | 60.137.761,00 | 12 | 66.151.537,00 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.852.000,00 | | 6.437.200,00 | | 7.080.920,00 | | 7.789.012,00 | | 8.567.913,00 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 5.852.000,00 | 1 | 6.437.200,00 | 1 | 7.080.920,00 | 1 | 7.789.012,00 | 1 | 8.567.913,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 392.238.273,00 | | 431.462.100,00 | | 474.608.310,00 | | 522.069.141,00 | | 574.276.055,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 13 | 13 | 392.238.273,00 | 13 | 431.462.100,00 | 13 | 474.608.310,00 | 13 | 522.069.141,00 | 13 | 574.276.055,00 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 57.035.000,00 | | 62.738.500,00 | | 69.012.350,00 | | 75.913.585,00 | | 83.504.944,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 57.035.000,00 | 1 | 62.738.500,00 | 1 | 69.012.350,00 | 1 | 75.913.585,00 | 1 | 83.504.944,00 | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 16.720.000,00 | | 18.392.000,00 | | 20.231.200,00 | | 22.254.320,00 | | 24.479.752,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6 | 6 | 16.720.000,00 | 6 | 18.392.000,00 | 6 | 20.231.200,00 | 6 | 22.254.320,00 | 6 | 24.479.752,00 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.315.000,00 | | 44.346.500,00 | | 48.781.150,00 | | 53.659.265,00 | | 59.025.192,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 40.315.000,00 | 1 | 44.346.500,00 | 1 | 48.781.150,00 | 1 | 53.659.265,00 | 1 | 59.025.192,00 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 36.371.900,00 | | 36.776.112,06 | | 37.324.194,21 | | 38.085.774,90 | | 38.978.844,50 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 36.371.900,00 | 100 | 36.776.112,06 | 100 | 37.324.194,21 | 100 | 38.085.774,90 | 100 | 38.978.844,50 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Paiton | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 28.424.000,00 | | 28.424.000,00 | | 28.424.000,00 | | 28.424.000,00 | | 28.424.000,00 | | |
| Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik selama satu tahun | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 12 | 12 | 28.424.000,00 | 12 | 28.424.000,00 | 12 | 28.424.000,00 | 12 | 28.424.000,00 | 12 | 28.424.000,00 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 28.424.000,00 | | 28.424.000,00 | | 28.424.000,00 | | 28.424.000,00 | | 28.424.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 12 | 12 | 28.424.000,00 | 12 | 28.424.000,00 | 12 | 28.424.000,00 | 12 | 28.424.000,00 | 12 | 28.424.000,00 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 7.947.900,00 | | 8.352.112,06 | | 8.900.194,21 | | 9.661.774,90 | | 10.554.844,50 | | |
| Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 3 | 3 | 7.947.900,00 | 3 | 8.352.112,06 | 3 | 8.900.194,21 | 3 | 9.661.774,90 | 3 | 10.554.844,50 | | |
| 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | 7.947.900,00 | | 8.352.112,06 | | 8.900.194,21 | | 9.661.774,90 | | 10.554.844,50 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 3 | 3 | 7.947.900,00 | 3 | 8.352.112,06 | 3 | 8.900.194,21 | 3 | 9.661.774,90 | 3 | 10.554.844,50 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 37.600.000,00 | | 38.017.860,31 | | 38.584.448,50 | | 39.371.744,01 | | 40.294.968,18 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 37.600.000,00 | 100 | 38.017.860,31 | 100 | 38.584.448,50 | 100 | 39.371.744,01 | 100 | 40.294.968,18 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Paiton | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 28.800.000,00 | | 28.337.860,31 | | 27.936.448,50 | | 27.658.944,01 | | 27.410.888,18 | | |
| Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Perekonomian Masyarakat di Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 28.800.000,00 | 2 | 28.337.860,31 | 2 | 27.936.448,50 | 2 | 27.658.944,01 | 2 | 27.410.888,18 | | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 11 | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 18.800.000,00 | | 19.008.930,00 | | 19.292.224,00 | | 19.685.872,00 | | 20.147.484,00 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 11 | 11 | 18.800.000,00 | 11 | 19.008.930,00 | 11 | 19.292.224,00 | 11 | 19.685.872,00 | 11 | 20.147.484,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 10.000.000,00 | | 9.328.930,31 | | 8.644.224,50 | | 7.973.072,01 | | 7.263.404,18 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 10.000.000,00 | 2 | 9.328.930,31 | 2 | 8.644.224,50 | 2 | 7.973.072,01 | 2 | 7.263.404,18 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 8.800.000,00 | | 9.680.000,00 | | 10.648.000,00 | | 11.712.800,00 | | 12.884.080,00 | | |
| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT** | **INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT** | **BASELINE TAHUN 2024** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |
| | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | | |
| | | | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 40 | 40 | 8.800.000,00 | 40 | 9.680.000,00 | 40 | 10.648.000,00 | 40 | 11.712.800,00 | 40 | 12.884.080,00 | | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 50 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 4.400.000,00 | | 4.840.000,00 | | 5.324.000,00 | | 5.856.400,00 | | 6.442.040,00 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 50 | 50 | 4.400.000,00 | 50 | 4.840.000,00 | 50 | 5.324.000,00 | 50 | 5.856.400,00 | 50 | 6.442.040,00 | | |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 4.400.000,00 | | 4.840.000,00 | | 5.324.000,00 | | 5.856.400,00 | | 6.442.040,00 | | |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 40 | 40 | 4.400.000,00 | 40 | 4.840.000,00 | 40 | 5.324.000,00 | 40 | 5.856.400,00 | 40 | 6.442.040,00 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 86.394.800,00 | | 87.354.931,86 | | 88.656.800,82 | | 90.465.796,54 | | 92.587.120,14 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 86.394.800,00 | 100 | 87.354.931,86 | 100 | 88.656.800,82 | 100 | 90.465.796,54 | 100 | 92.587.120,14 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Paiton | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 86.394.800,00 | | 87.354.931,86 | | 88.656.800,82 | | 90.465.796,54 | | 92.587.120,14 | | |
| Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik selama satu tahun | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | 86.394.800,00 | 3 | 87.354.931,86 | 3 | 88.656.800,82 | 3 | 90.465.796,54 | 3 | 92.587.120,14 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 86.394.800,00 | | 87.354.931,86 | | 88.656.800,82 | | 90.465.796,54 | | 92.587.120,14 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | 86.394.800,00 | 3 | 87.354.931,86 | 3 | 88.656.800,82 | 3 | 90.465.796,54 | 3 | 92.587.120,14 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 69.000.000,00 | | 69.766.818,12 | | 70.806.567,71 | | 72.251.338,74 | | 73.945.553,31 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 69.000.000,00 | 100 | 69.766.818,12 | 100 | 70.806.567,71 | 100 | 72.251.338,74 | 100 | 73.945.553,31 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Paiton | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 69.000.000,00 | | 69.766.818,12 | | 70.806.567,71 | | 72.251.338,74 | | 73.945.553,31 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 100 | 100 | 69.000.000,00 | 100 | 69.766.818,12 | 100 | 70.806.567,71 | 100 | 72.251.338,74 | 100 | 73.945.553,31 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 69.000.000,00 | | 69.766.818,12 | | 70.806.567,71 | | 72.251.338,74 | | 73.945.553,31 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 100 | 100 | 69.000.000,00 | 100 | 69.766.818,12 | 100 | 70.806.567,71 | 100 | 72.251.338,74 | 100 | 73.945.553,31 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 21.000.000,00 | | 21.233.379,43 | | 21.549.824,96 | | 21.989.537,88 | | 22.505.168,40 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 21.000.000,00 | 100 | 21.233.379,43 | 100 | 21.549.824,96 | 100 | 21.989.537,88 | 100 | 22.505.168,40 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Paiton | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 21.000.000,00 | | 21.233.379,43 | | 21.549.824,96 | | 21.989.537,88 | | 22.505.168,40 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 21.000.000,00 | 2 | 21.233.379,43 | 2 | 21.549.824,96 | 2 | 21.989.537,88 | 2 | 22.505.168,40 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 21.000.000,00 | | 21.233.379,43 | | 21.549.824,96 | | 21.989.537,88 | | 22.505.168,40 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 21.000.000,00 | 2 | 21.233.379,43 | 2 | 21.549.824,96 | 2 | 21.989.537,88 | 2 | 22.505.168,40 | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Isu Strategis, Sasaran Utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan Daerah. Kecamatan tidak terdapat Program Prioritas dikarenakan Kecamatan sebagai fasilitator dari Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam mendukung terlaksananya Program Prioritas tersebut.

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| No | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |
| | Sae kerja-probolinggo bebas korupsi | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK<br>Kegiatan<br>Sub kegiatan | |

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paitonsebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paiton**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Paiton | | | | | | | | | |
| 2. | Indeks kepuasan Masyarakat | Indeks | 85,13 | 85,98 | 86,84 | 87,71 | 88,59 | 89,47 | 90,37 | |
| 3. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 4. | Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | 89,83 | 90,73 | 91,64 | 92,55 | 93,48 | 94,41 | 95,36 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Paitonsebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Paiton**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1. | 7.01 - KECAMATAN | | | | | | | | | | |
| 2. | Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara berkualitas | positif | % | 89,83 | 90,73 | 91,64 | 92,55 | 93,48 | 94,41 | 95,36 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Paiton.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Paiton.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

**CAMAT PAITON**

**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**Drs. IMAM SYAFI'I, M.Si.**
Pembina Tingkat 1
NIP. 19691206 200312 1 004

# RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN PAJARAKAN

TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, rnarilah kita bersarna-sarna tetap rnelaksanakan amanah dalam bidang tugas kita maslng-maslng bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai. Rencana Strategis Kecamatan Pajarakan Tahun 2025-2029 disusun untuk rnemberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecarnatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo tahun 2025– 2029 ini rnengacu pada visi, misi dan program Bupati Probolinggo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan sernoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 26 September 2025
**Camat Pajarakan**

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN PAJARAKAN

**SUDARMONO, ST., M.M**
**Pembina**
**NIP. 197904042010011009**

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... ii
**DAFTAR ISI** ..... iii
**BAB I** ..... 1
**PENDAHULUAN** ..... 1
**1.1 Latar Belakang** ..... 1
**1.2 Landasan Hukum** ..... 2
**1.3 Maksud dan Tujuan** ..... 5
**1.4 Sistematika Penulisan** ..... 5
**BAB II** ..... 7
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN** ..... 7
**DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
**2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pajarakan** ..... **7**
**2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** ..... **19**
**BAB III** ..... **20**
**TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... **20**
**3.1 Tujuan Renstra Kecamatan PajarakanTahun 2025-2029** ..... **20**
**3.2 Sasaran Renstra Kecamatan PajarakanTahun 2025-2029** ..... **23**
**3.3 Straregi Kecamatan Pajarakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025- 2029** ..... 25
**3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan PajarakanTahun 2025-2029** ..... 29
**BAB IV** ..... 31
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** ..... 31
**4.1 Uraian Program** ..... 31
**4.2 Uraian Kegiatan** ..... 33
**BAB V** ..... 47
**PENUTUP** ..... 47

# DAFTAR TABEL

*Tabel 2.1.b.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Pajarakan Berdasarkan pangkat dan Golongan tahun 2025*

*Tabel 2.1.b.2 Jumlah Sarana Prsasarana Kecamatan Pajarakan Tahun 2025*

*Tabel 2.1.c Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pajarakan*

*Tabel 2.2 Isu Strategis Kecamatan Pajarakan*

*Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis (Renstra)*

*Table 3.5 Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) dan Pendanaan*

*Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukum Program Prioritas Pembangunan Daerah*

*Table 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah*

*Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci*

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan PajarakanKabupaten Probolinggo yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan PajarakanTahun 2025 - 2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Pajarakan yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pajarakan yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Pajarakan sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Pajarakan juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Probolinggo, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

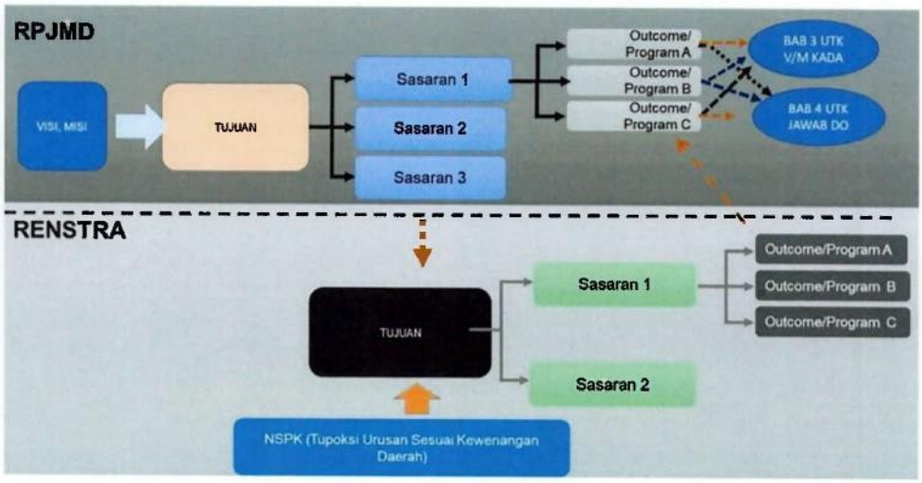


Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Pajarakan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Probolinggo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pajarakan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pajarakan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional

Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan ke Tiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentangf Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2024-2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 1 Seri D;
36. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo;

37. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 19 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Pajarakan Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan PajarakanTahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pajarakan ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pajarakan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DAN KINERJA

BAB V PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pajarakan

### a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Pajarakan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatnnya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan Pajarakan

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan tentang Kedudukan Kabupaten Probolinggo, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Pajarakan :

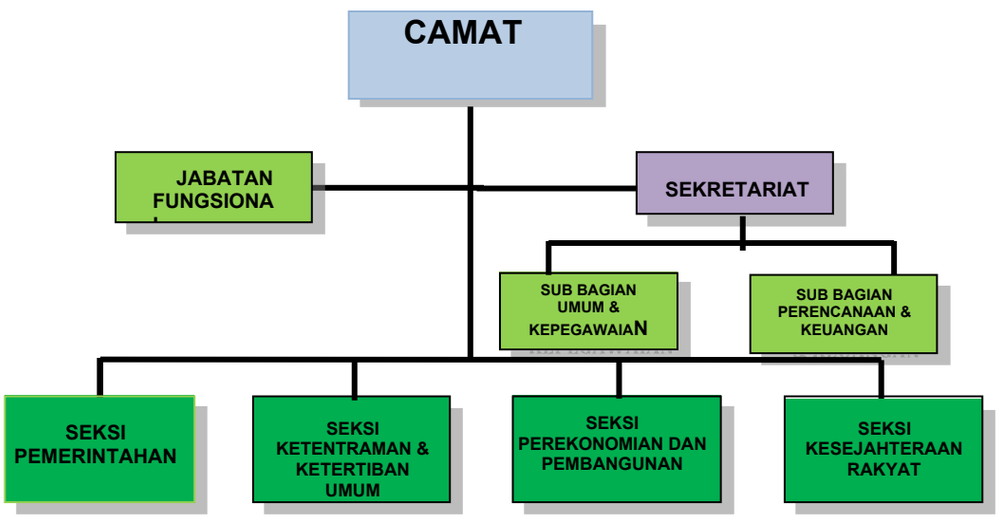

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Pajarakan Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

(1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

(1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian,

perencanaan dan keuangan serta barang milikdaerah;

c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah padaKecamatan dan Kelurahan;
d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai**

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milikdaerah serta pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :

a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barangmilik daerah;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana danprasarana serta pemeliharaan;
d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatansumber daya manusia;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d. pengelolaan urusan administrasi keuangan; pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. Kepala Seksi Pemerintahan**

(1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

(1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum.

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

b. persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

c. persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

d. pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata.

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

(1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidangperekonomian dan pembangunan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;

e. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi

dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;

f. pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat**

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat.

(2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. Kelompok Jabatan Fungsional**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan.

(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pajarakan

Struktur Organisasi Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat.
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Berikut merupakan data pegawai Kecamatan PajarakanTahun 2025 tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.b.1
Data Pegawai Kecamatan Pajarakan

| No | Uraian | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| I | Pegawai PNS | 13 | - | 13 |
| II | Pegawai CPNS | - | - | - |
| III | Pegawai PPPK | - | - | - |
| IV | Non PNS | 2 | 2 | 4 |
| V | Tingkat Pendidikan CPNS dan PNS : | | | |
| | 1. SLTA | 4 | - | 4 |
| | 2. D-3 | - | - | - |
| | 3. D-4 | - | - | - |
| | 4. S1 | 4 | - | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5. S2 | 5 | - | 5 |
| VI | Golongan Kepangkatan CPNS dan PNS: | | | |
| | 1. II a | - | - | - |
| | 2. II b | - | - | - |
| | 3. II c | - | - | - |
| | 1. II d | 4 | - | 4 |
| | 2. III a | - | - | - |
| | 3. III b | - | - | - |
| | 4. III c | 2 | - | 2 |
| | 5. III d | 6 | - | 6 |
| | 9. IV a | 1 | - | 1 |
| | 10. IV b | - | - | - |
| VII | Golongan PPPK: | - | - | - |
| | | - | - | - |
| V | Agama: | | | |
| | Islam | 17 | - | 17 |
| | Katolik | - | - | - |
| | Budha | - | - | - |
| | Hindu | - | - | - |
| | Lainnya | - | - | - |
| VI | Pejabat struktural | 7 | - | 7 |
| VII | Fungsional umum/Staf | 8 | 2 | 10 |

Sumber data: Kecamatan Pajarakan 2025

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Pajarakan terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Jalan Raya Pajarakan No. 100 Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Berikut merupakan sarana dan prasarana Kecamatan Pajarakan :

Tabel 2.1.b.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Pajarakan

| NO. | URAIAN SARPRAS | JUMLAH | SATUAN |
|---|---|---|---|
| **Sarana** | | | |
| 1 | Mobil Dinas | 1 | Unit |
| 2 | Sepeda Motor Axelo | 1 | Unit |
| 3 | Sepeda Motor Suzuki 110 | 4 | Unit |
| 4 | Sepeda Motor Suzuki 100 | 1 | Unit |
| 5 | Lemari Besi / Metal | 2 | Buah |
| 6 | Finger Print | 1 | Unit |
| 7 | Genset | 1 | Unit |
| 8 | Lemari Arsip | 5 | Buah |
| 9 | AC | 4 | Unit |
| 10 | Televisi | 1 | Unit |
| 11 | Sound System | 1 | Unit |
| 12 | Papan Pembatas ruangan | 7 | Unit |
| 13 | CCTV | 1 | Unit |
| 14 | Interaktive Dispaly | 1 | Unit |
| 15 | LCD Prjector | 2 | Unit |
| 16 | Lemari Kayu | 3 | Buah |
| 17 | Kursi Tamu | 6 | Buah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | Kursi Pelayanan | 4 | Buah |
| 19 | Kursi Tunggu | 2 | Buah |
| 20 | Kursi Rapat | 50 | Buah |
| 21 | Meja Kerja Kayu | 21 | Buah |
| 22 | Kasur / Springbed | 1 | Buah |
| 23 | Lemari Es | 1 | Buah |
| 24 | Sanyo Air | 2 | Unit |
| 25 | Top Speaker | 1 | Unit |
| 26 | Power Fan | 6 | Unit |
| 27 | Alat Pemadam / Portable | 1 | Unit |
| 28 | Meja tulis | 10 | Buah |
| 29 | Rak / Credenza | 1 | Buah |
| 30 | Meja Pelayanan | 1 | Buah |
| 31 | Meja Kerja Pejabat Eselon | 7 | Buah |
| 32 | Meja Kerja Pelaksana | 7 | Buah |
| 33 | Meja Rapat | 7 | Buah |
| 34 | Kursi rapat pejabat | 4 | Buah |
| 35 | Kursi kerja pelaksana | 10 | Buah |
| 36 | Kursi kerja pejabat eselon IV | 8 | Buah |
| 37 | Kamera Digital | 2 | Unit |
| 38 | Audio Mixing Portable | 1 | Unit |
| 39 | Wireless Audio Conference | 1 | Unit |
| 40 | Web Camera Conference | 1 | Unit |
| 41 | Loudspeaker | 2 | Unit |
| 42 | Tablet | 1 | Unit |
| 43 | Kursi dorong | 1 | Buah |
| 44 | PC Unit | 10 | Unit |
| 45 | Laptop | 12 | Unit |
| 46 | Note Book | 7 | Unit |
| 47 | Onboard Computer (OPS) | 1 | Unit |
| 48 | Printer | 5 | Unit |
| 49 | Scanner | 2 | Unit |
| 50 | Barcorde Scanner | 1 | Unit |
| 51 | Meja Podium | 1 | Buah |
| 52 | Pendopo | 1 | Unit |
| 53 | Gedung Kantor | 1 | Unit |
| 54 | Rumah Dinas | 1 | Unit |
| **Prasarana** | | | |
| 1 | Internet | 2 | Unit |
| 2 | Instalasi Listrik | 10.400 w | VA |

**c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pajarakan**

Kecamatan Pajarakan menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat,

dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pajarakan dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **baik** dengan **rasio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Pajarakan berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 80,13 (2021) menjadi 84,28 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2022.
- **Persentase pelayanan publik sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 80% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator **nilai SAKIP** dan **reformasi birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian NA di Tahun 2024 yaitu 72,21, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data perbandingan antara realisasi dan capaian berbasis kinerja dengan realisasi dan capaian berbasis Anggaran di dalam Indikator kinerja (IKU) kecamatan Pajarakan yaitu:

- IKU Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas dengan target 100%, capaian kinerja 84,28% dengan capaian realisasi anggaran 99,71% dengan tingkat efisiensi -15,73% kategori belum efisien.
- IKU Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi target 100%, capaian kinerja 99% dengan capaian realisasi anggaran 99,75% dengan tingkat efisiensi -0,75% kategori belum efisien.
- IKU Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan target 100%, capaian kinerja 95% dengan capaian realisasi anggaran 99,80% dengan tingkat efisiensi -4,8% kategori belum efisien
- IKU Persentase desa/kelurahan yang telah dibina target 100%, capaian kinerja 90% dengan capaian realisasi anggaran 0% dengan tingkat efisiensi 90% kategori efisien**,** kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan tugas - tugas pelimpahan yang dilaksanakan oleh kecamatan
- IKU Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah target 0,5%, realisasi dan capaian nilai AKIP Tahun 2024 oleh APIP di Bulan Maret 2025 yaitu 72,21.

Secara keseluruhan, Kecamatan Pajarakan menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

**Tabel 2.1.1.c**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pajarakan**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | SPM | Target Indikator Lainnya | Realisasi 2020 | Target Renstra perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | | | | | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 81,96% | 84,73% | 84,28 % | 0,75% | 0,82% | 0,85% | 0,84% | 5,7% | 81% |
| 2 | Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan | | | | | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 86.91% | 93,4% | 95% | 0,92% | 0,87% | 0,93% | 0,95% | 8,9% | 90% |
| 3 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | | | | | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 95% | 99% | 99,75% | 0,92% | 0,95% | 0,99% | 1% | 2,10% | 93% |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | | | | | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0,90% | 0% | 0% |
| 5 | Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah | | | | | 71,24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71,95 | 71,15 | 71,71 | 72,21 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 2,5% | 71 |

Kecamatan Pajarakan menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai mendekati target, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 84,28, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, , umumnya berkinerja "**Baik"**. Kecamatan Pajarakan telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

**d. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Pajarakan**

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana

organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pajarakan dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.2
## Isu Strategis Kecamatan Pajarakan

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Potensi Pertanian dan Perkebunan | Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan Publik | Terdapatnya lahan yang terkontaminasi oleh Limbah B3 kegiatan Industri besar di sekitar sungai besar | Desentralisasi dan Otonomi Daerah | Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan | Keterbatasan Kewenangan Kecamatan | Belum Optimalnya Penyelanggaraan Pelayanan Kecamatan |
| Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa | Terdapat lahan terkotaminasi Limbah B3 yang harus dipulihkan lokasinya di Desa Pajarakan kulon, Tanjung | Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal | Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan | Disparitas Antar Wilayah | Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa |
| Potensi Wisata | | Adanya Pantai di Kecamatan Pajarakan. | Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan | Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor | Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten | |
| Potensi Desa Wisata dan Agrowisata | | Terdapat lahan bekas galian C bekas Tol yang belum di fungsikan sehingga menjadi genangan air saat musim penghujan | Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis | Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi | Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan untuk mewujudkan swasembada pangan Nasional | | Adanya banjir yang terjadi di Kecamatan Pajarakan pada Desa Sukokerto, Penambangan, Pajarakan Kulon, Ketompen dan Karangbong | Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan | Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan | Lemahnya Implementasi e-Government | |
| | | Layanan pencegahan proteksi kebakaran belum dilakukan dengan optimal di Kecamatan Pajarakan, | Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat | Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial | Partisipasi Masyarakat dan Transparansi | |
| | | Adanya bangunan liar di Kecamatan Pajarakan | | Penanganan Konflik Sosial dan Bencana | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Masih adanya kasus stunting di Kecamatan Pajarakan | | | | |
| | | Rendahnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di Pajarakan | | | | |
| | | Menurunnya nilai wawasan kebangsaan generasi muda (di seluruh Kabupaten Probolinggo). | | | | |

# BAB III
# TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Pajarakan Tahun 2025 - 2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Pajarakan Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan Pajarakan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***. Tujuan tersebut selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: "***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pajarakan, dalam hal ini Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Pajarakan Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pajarakan menetapkan sasaran strategi ”Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pajarakan tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Pajarakan

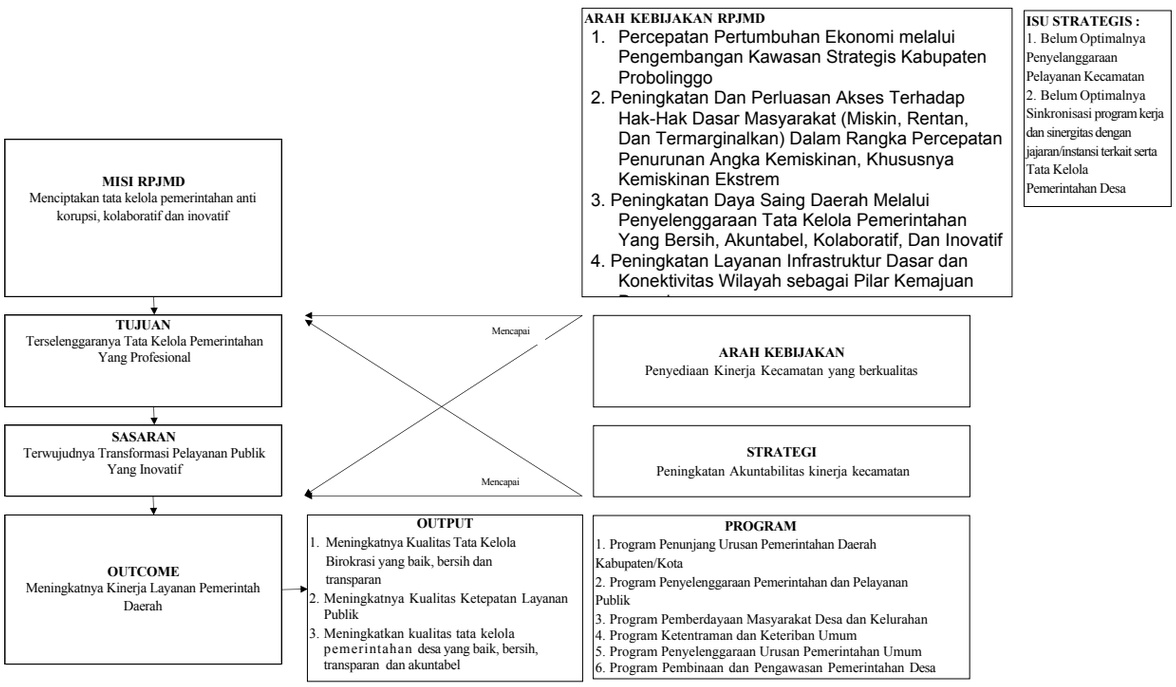


RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi Kepala Daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Pajarakan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah

3. Menjadi dasar penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Renja (Rencana Kerja) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

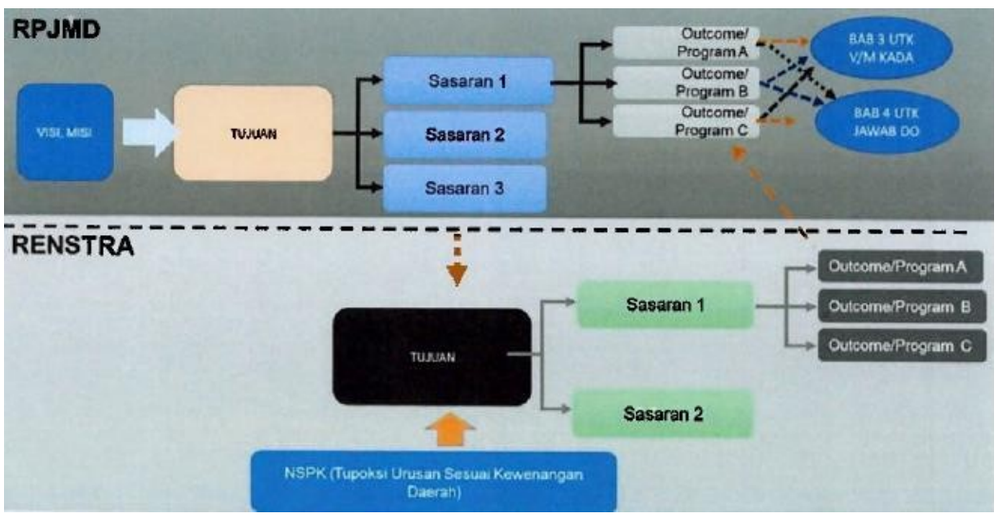


**Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pajarakan** adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. **Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :**

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (**Specific**, **Measurable**, **Achievable, Relevant, Time-bound**) secara Lengkap

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pajarakan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pajarakan

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Ikdeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (RPJMD) | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,5 | 90,00 | 91,00 | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | 85,12 | 85,97 | 86,83 | 87,70 | 88,58 | 89,46 | Nilai SKM e SUKMA Prop Jatim |

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Serta memperhatikan Devinisi Operasional sudah ditetapkan dengan perhitungan rumus yang telah ditentukan.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam **Strategi Pembangunan**, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam **Arah Kebijakan**, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan,

peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.3. Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VISI : **TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO SAE, SEJAHTERA, AMANAH RELIGIUS SERTA EXSIS BERDAYA SAING** | | | | |
| MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif | | | | |
| **TUJUAN / INDIKATOR** | **SASARAN / INDIKATOR** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif<br><br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah<br>Indikator :<br>Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah<br>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan | Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan` | 1 | Penguatan Sistem Perencanaan dan pengukuran Kinerja |
| | | | 2 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan |
| | | | 3 | Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| | | | 4 | Transparansi dan Pelibatan Publik |
| | | | 5 | Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan kecamatan | 1 | Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik |
| | | | 2 | Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi |
| | | | 3 | Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting |
| | | | 4 | Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran |
| | | | 5 | Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat |
| | | Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat di kecamatan | 1 | Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses |
| | | | 2 | Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan |
| | | | 3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan |
| | | | 4 | Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik |
| | | | 5 | Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas |

## 3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan PajarakanTahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

**Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Pajarakan** sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. **Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Pajarakan:**

1. Meningkatkan **ketepatan sasaran** program/kegiatan.
2. Mempermudah **koordinasi antarperangkat daerah**.
3. Mendukung **pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah**.
4. Menunjang **penggunaan sistem informasi pembangunan daerah**.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik) | Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik) | Pemberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat) | Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes serta Koperasi Merah Putih) | Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat) |

## 3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pajarakan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Pajarakan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pajarakan

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN ) | 1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Probolinggo<br>2. Peningkatan Dan Perluasan Akses Terhadap Hak-Hak Dasar Masyarakat (Miskin, Rentan, Dan Termarginalkan) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan, Khususnya Kemiskinan Ekstrem<br>3. Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Kolaboratif, Dan Inovatif<br>4. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah sebagai Pilar Kemajuan Daerah | 1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan<br>2. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja<br>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi<br>4. Transparansi dan Pelibatan Publik<br>5. Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten<br>6. Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik<br>7. Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi<br>8. Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting<br>9. Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran<br>10. Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat<br>11. Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah diakses<br>12. Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan | |
| 2 | Mempercepat Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata (SAE INFRASTRUKTUR) | | | |
| 3 | Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan (SAE EKONOMI) Peningkatan kemandirian Masyarakat Miskin | | | |
| 4 | Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau (SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN) | | | |
| 5 | Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas (SAE SOSIAL) | | | |

Sumber data : RPJMD Tahun 2025=2029; Lampiran Perda Nomor 5 Tahun 2025 BAB III hal 59

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Pajarakan ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Pajarakan adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam memberdayakan kelompok – kelompok masyarakat desa dan kelurahan untuk wujudkan peningkatan pendidikan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang adil , merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat pedesaan dan kelurahan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkuan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan sebagai sarana komunikasi serta menampung aspirasi dan permasalahan dimasyarakat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pajarakanmerupakan **Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya**, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pajarakan juga merupakan proses strategis yang harus **terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah**. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pajarakan serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pajarakan dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pajarakan

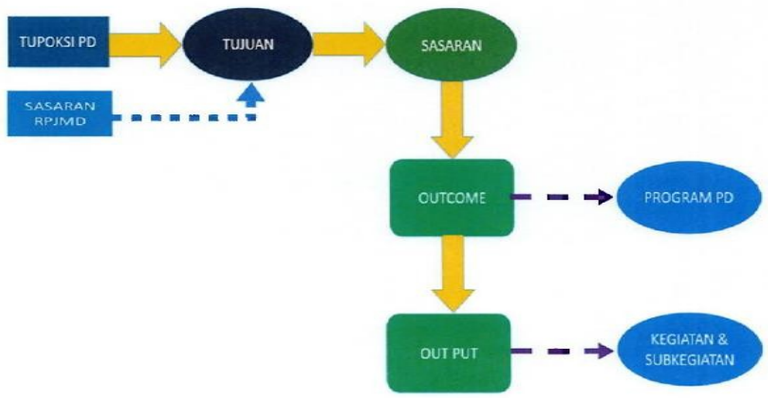


**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.846.783.513,55 | | 2.881.454.030,02 | | 2.924.459.763,02 | | 2.984.067.739,1 | | 3.054.040.851,25 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.662.577.513,55 | | 2.692.167.552,46 | | 2.732.289.493,03 | | 2.788.040.433 | | 2.853.416.920,05 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,56 | 0,05 | 0,05 | 2.662.577.513,55 | 0,05 | 2.692.167.552,46 | 0,05 | 2.732.289.493,03 | 0,05 | 2.788.040.433 | 0,05 | 2.853.416.920,05 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 30.000.000 | | 30.333.399,18 | | 30.785.464,23 | | 31.413.625,54 | | 32.150.240,57 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.333.399,18 | 100 | 30.785.464,23 | 100 | 31.413.625,54 | 100 | 32.150.240,57 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 29.118.000 | | 29.441.597,25 | | 29.880.371,58 | | 30.490.064,95 | | 31.205.023,5 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 29.118.000 | 100 | 29.441.597,25 | 100 | 29.880.371,58 | 100 | 30.490.064,95 | 100 | 31.205.023,5 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 58.200.000 | | 58.846.794,41 | | 59.723.800,6 | | 60.942.433,55 | | 62.371.466,71 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 58.200.000 | 100 | 58.846.794,41 | 100 | 59.723.800,6 | 100 | 60.942.433,55 | 100 | 62.371.466,71 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 66.888.000 | | 67.631.346,81 | | 68.639.271,03 | | 70.039.819,51 | | 71.682.176,37 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 66.888.000 | 100 | 67.631.346,81 | 100 | 68.639.271,03 | 100 | 70.039.819,51 | 100 | 71.682.176,37 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 0 | | 3.033.339,91 | | 3.141.362,55 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.033.339,91 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.215.024,05 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2846783513,55 | | 2881454030,02 | | 2924459763,02 | | 2984067739,10 | | 3054040851,25 | |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Pajarakanadalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk menunjang kinerja pelayanan publik kecamatan serta menjalankan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Pajarakan, maka dapat dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Pajarakan dijelaskan pada pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Pajarakan

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| **7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Pajarakan** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas tata kelola perangkat daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Persentase penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | terwujudnya peningkatan taraf hidup pekonomian masyarakat di desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga baik secara kesehatan, sosial, dan lingkungan di tingkat pedesaan/kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan **penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah**, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.846.783.513,55 | | 2.881.454.030,02 | | 2.924.459.763,02 | | 2.984.067.739,1 | | 3.054.040.851,25 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.662.577.513,55 | | 2.692.167.552,46 | | 2.732.289.493,03 | | 2.788.040.433 | | 2.853.416.920,05 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,56 | 0,05 | 2.662.577.513,55 | 0,05 | 2.692.167.552,46 | 0,05 | 2.732.289.493,03 | 0,05 | 2.788.040.433 | 0,05 | 2.853.416.920,05 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Pajarakan | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.657.968.234 | | 2.657.968.234 | | 2.657.968.234 | | 2.657.968.234 | | 2.657.968.234 | | |
| Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 48 | 2.657.968.234 | 48 | 2.657.968.234 | 48 | 2.657.968.234 | 48 | 2.657.968.234 | 48 | 2.657.968.234 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.657.968.234 | | 2.657.968.234 | | 2.657.968.234 | | 2.657.968.234 | | 2.657.968.234 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 14 | 2.657.968.234 | 14 | 2.657.968.234 | 14 | 2.657.968.234 | 14 | 2.657.968.234 | 14 | 2.657.968.234 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 4.609.279,55 | | 34.199.318,46 | | 74.321.259,03 | | 130.072.199 | | 195.448.686,05 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Persentase penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | 4.609.279,55 | | 34.199.318,46 | | 74.321.259,03 | | 130.072.199 | | 195.448.686,05 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 4.609.279,55 | | 34.199.318,46 | | 74.321.259,03 | | 130.072.199 | | 195.448.686,05 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 4.609.279,55 | 12 | 34.199.318,46 | 12 | 74.321.259,03 | 12 | 130.072.199 | 12 | 195.448.686,05 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 30.000.000 | | 30.333.399,18 | | 30.785.464,23 | | 31.413.625,54 | | 32.150.240,57 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.333.399,18 | 100 | 30.785.464,23 | 100 | 31.413.625,54 | 100 | 32.150.240,57 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Pajarakan | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 30.000.000 | | 30.333.399,18 | | 30.785.464,23 | | 31.413.625,54 | | 32.150.240,57 | | |
| Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | 30.000.000 | | 30.333.399,18 | | 30.785.464,23 | | 31.413.625,54 | | 32.150.240,57 | | |
| | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 26 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 30.000.000 | | 30.333.399,18 | | 30.785.464,23 | | 31.413.625,54 | | 32.150.240,57 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 26 | 9 | 30.000.000 | 9 | 30.333.399,18 | 9 | 30.785.464,23 | 9 | 31.413.625,54 | 9 | 32.150.240,57 | | |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 29.118.000 | | 29.441.597,25 | | 29.880.371,58 | | 30.490.064,95 | | 31.205.023,5 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 29.118.000 | 100 | 29.441.597,25 | 100 | 29.880.371,58 | 100 | 30.490.064,95 | 100 | 31.205.023,5 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Pajarakan | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 14.559.000 | | 14.720.798,25 | | 14.940.185,58 | | 15.245.032,95 | | 15.602.511,75 | | |
| terwujudnya peningkatan taraf hidup pekonomian masyarakat di desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | 14.559.000 | | 14.720.798,25 | | 14.940.185,58 | | 15.245.032,95 | | 15.602.511,75 | | |
| | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 14.559.000 | | 14.720.798,25 | | 14.940.185,58 | | 15.245.032,95 | | 15.602.511,75 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | 100 | 14.559.000 | 100 | 14.720.798,25 | 100 | 14.940.185,58 | 100 | 15.245.032,95 | 100 | 15.602.511,75 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 14.559.000 | | 14.720.799 | | 14.940.186 | | 15.245.032 | | 15.602.511,75 | | |
| terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga baik secara kesehatan, sosial, dan lingkungan di tingkat pedesaan/kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 4 | 4 | 14.559.000 | 4 | 14.720.799 | 4 | 14.940.186 | 4 | 15.245.032 | 4 | 15.602.511,75 | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 14.559.000 | | 14.720.799 | | 14.940.186 | | 15.245.032 | | 15.602.511,75 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 4 | 4 | 14.559.000 | 4 | 14.720.799 | 4 | 14.940.186 | 4 | 15.245.032 | 4 | 15.602.511,75 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 58.200.000 | | 58.846.794,41 | | 59.723.800,6 | | 60.942.433,55 | | 62.371.466,71 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 58.200.000 | 100 | 58.846.794,41 | 100 | 59.723.800,6 | 100 | 60.942.433,55 | 100 | 62.371.466,71 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Pajarakan | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 58.200.000 | | 58.846.794,41 | | 59.723.800,6 | | 60.942.433,55 | | 62.371.466,71 | | |
| terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | 58.200.000 | 14 | 58.846.794,41 | 14 | 59.723.800,6 | 14 | 60.942.433,55 | 14 | 62.371.466,71 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 58.200.000 | | 58.846.794,41 | | 59.723.800,6 | | 60.942.433,55 | | 62.371.466,71 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | 58.200.000 | 14 | 58.846.794,41 | 14 | 59.723.800,6 | 14 | 60.942.433,55 | 14 | 62.371.466,71 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 66.888.000 | | 67.631.346,81 | | 68.639.271,03 | | 70.039.819,51 | | 71.682.176,37 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 66.888.000 | 100 | 67.631.346,81 | 100 | 68.639.271,03 | 100 | 70.039.819,51 | 100 | 71.682.176,37 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Pajarakan | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 66.888.000 | | 67.631.346,81 | | 68.639.271,03 | | 70.039.819,51 | | 71.682.176,37 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.605 | 1.605 | 66.888.000 | 1.605 | 67.631.346,81 | 1.605 | 68.639.271,03 | 1.605 | 70.039.819,51 | 1.605 | 71.682.176,37 | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 66.888.000 | | 67.631.346,81 | | 68.639.271,03 | | 70.039.819,51 | | 71.682.176,37 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.605 | 1.605 | 66.888.000 | 1.605 | 67.631.346,81 | 1.605 | 68.639.271,03 | 1.605 | 70.039.819,51 | 1.605 | 71.682.176,37 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 0 | | 3.033.339,91 | | 3.141.362,55 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.033.339,91 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.141.362,55 | 100 | 3.215.024,05 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Pajarakan | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 0 | | 3.033.339,91 | | 3.141.362,55 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 14 | 14 | 0 | 14 | 3.033.339,91 | 14 | 3.141.362,55 | 14 | 3.141.362,55 | 14 | 3.215.024,05 | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 0 | | 3.033.339,91 | | 3.141.362,55 | | 3.141.362,55 | | 3.215.024,05 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 14 | 14 | 0 | 14 | 3.033.339,91 | 14 | 3.141.362,55 | 14 | 3.141.362,55 | 14 | 3.215.024,05 | | |

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah yang tertuang dalam Lampiran Perda RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Nomor 5 Tahun 2025 Bab 3 tentang Program Prioritas RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 halaman III/83 di Misi 1 SAE PEMERINTAHAN Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif dengan Program Prioritas 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK. Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4

Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Pajarakan** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |

dikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pajarakan sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pajarakan

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Pajarakan | | | | | | | | | |
| 2. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 72,56 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 3. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 83,43 | 84,26 | 85,1 | 85,95 | 86,81 | 87,68 | 88,56 | |

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)** adalah **ukuran keberhasilan yang bersifat operasional** dan digunakan untuk menilai capaian **kinerja kegiatan atau sub kegiatan** dalam rangka mendukung pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** perangkat daerah. **Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pajarakan** sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.6 dibawah ini

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pajarakan

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | 7.01 - KECAMATAN | | | | | | | | | | |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | | Indeks | 83,43 | 84,26 | 85,1 | 85,95 | 86,81 | 87,68 | 88,56 | |

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Pajarakan.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Pajarakan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, September 2025

**Camat Pajarakan**

**SUDARMONO, ST., M.M**
**Pembina**
**NIP. 197904042010011009**

# RENCANA STRATEGIS

# ( RENSTRA )

# KECAMATAN PAKUNIRAN

# TAHUN 2025-2029

**KECAMATAN PAKUNIRAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakuniran Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Pakuniran Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Pakuniran. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pakuniran. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Pakuniran dengan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

Pakuniran, 22 September 2025

Plt. CAMAT PAKUNIRAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**HASAN ZAINURI, S.Ag. MM**
Pembina
NIP. 19750930 200312 1 002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 6
1.4 Sistematika Penulisan ..... 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pakuniran ..... 10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Pakuniran ..... 17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakuniran ..... 21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 27
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Pakuniran ..... 27
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Pakuniran ..... 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakuniran Tahun 2025-2029 ..... 32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pakuniran dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 40
4.1 Uraian Program ..... 40
4.2 Uraian Kegiatan ..... 44
BAB V PENUTUP ..... 79
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 79
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 80

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..……..… 18
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ……..…… 19
Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..….. 19
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ……. 22
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo (2020-2024) …… 23
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Pakuniran ……..… 30
Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 …….. 35
Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Pakuniran …… 36
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Pakuniran ……..... 38
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Pakuniran …… 39
Tabel 4.1 Program Kecamatan Pakuniran ……. 42
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakuniran ……. 46
Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Pakuniran …….. 53
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pakuniran ……. 56
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… 77
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakuniran …….. 78
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pakuniran …… 78

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pakuniran ..... 17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo ..... 33
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah ..... 34
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakuniran ..... 45

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Pakuniran menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakuniran setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Pakuniran juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Pakuniran. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Pakuniran berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Pakuniran terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakuniran yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Pakuniran untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Pakuniran berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Pakuniran dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Pakuniran disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Pakuniran akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Pakuniran dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Pakuniran untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Pakuniran berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan

Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta Pembangunan wilayah melalui Perencanaan yang sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAKUNIRAN**

Bab II memuat :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pakuniran
2.2 Sumber Daya Kecamatan Pakuniran
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakuniran
2.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Pakuniran
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pakuniran

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakuniran Tahun 2025-2029
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pakuniran dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pakuniran 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pakuniran; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pakuniran

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Pakuniran Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
   b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;

c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;

b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Pakuniran**

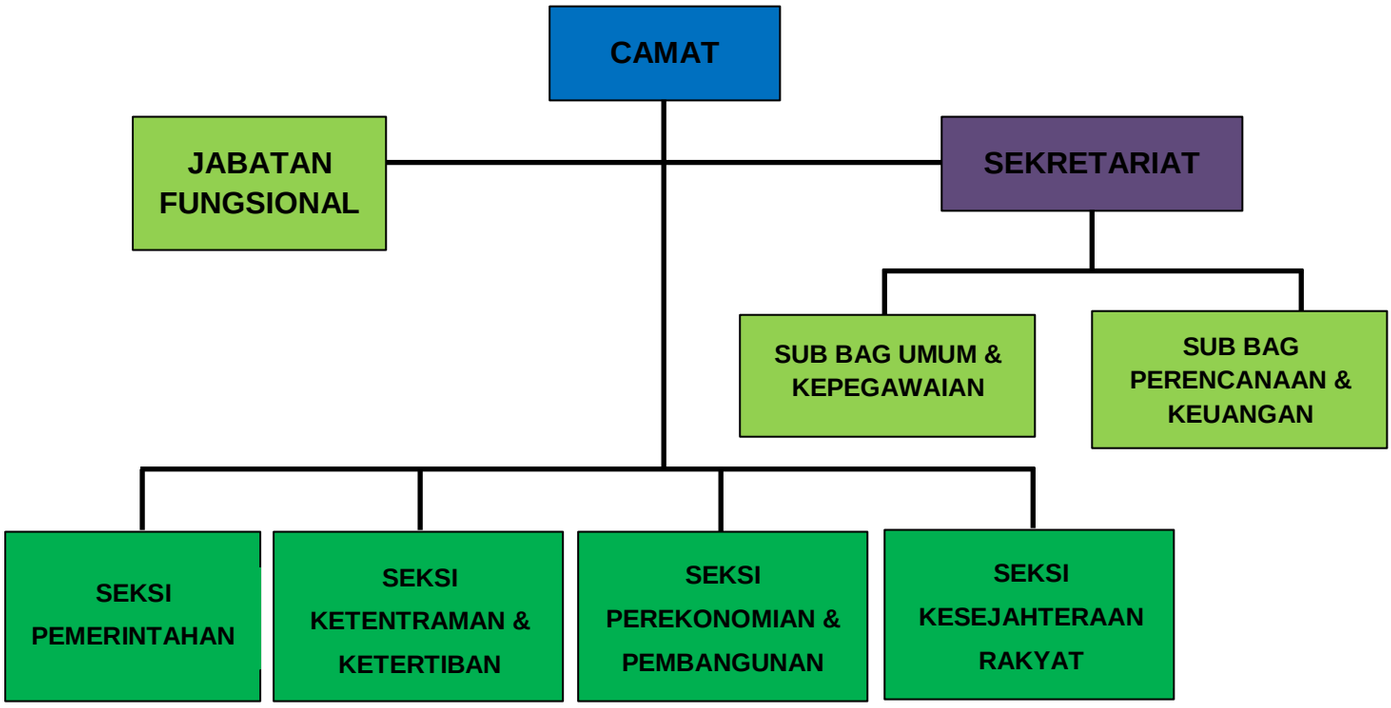


Struktur Organisasi Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Pakuniran

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Pakuniran.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Pakuniran sebanyak 23 orang dengan rincian : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 15 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 3 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 5 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Pakuniran berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | **3** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | **2** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | **2** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 10. | Honorer | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | **8** |
| **Jumlah** | | **0** | **1** | **8** | **0** | **6** | **5** | **16** | **4** | **20** |

***Sumber Data : Kecamatan Pakuniran***

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan**

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | **16** | 1 | 4 | 6 | 5 | **16** |
| 2. | Perempuan | - | 0 | 1 | - | 0 | 3 | **4** | - | 1 | 0 | 3 | **4** |
| **Jumlah** | | **-** | **5** | **5** | **2** | **0** | **8** | **20** | **1** | **5** | **6** | **8** | **20** |

***Sumber Data : Kecamatan Pakuniran***

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.3**

**Jumlah Sarana Prasarana**

| No | Jenis Aset | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| Sarana | | | |
| 1 | Mobil Dinas port Utility Vehicle (SUV) | 1 | Unit |
| 2 | Sepeda Motor Suzuki Axelo 125 | 1 | Unit |
| 3 | Sepeda Trill Kawasaki 150 | 1 | Unit |
| 4 | Sepeda Motor Suzuki Axelo 125 | 1 | Unit |
| 5 | Sepeda Motor Suzuki Smash 110 | 1 | Unit |
| 6 | Sepeda Motor Sogun RR | 1 | Unit |
| 7 | Sepeda Motor Jupiter z | 1 | Unit |
| 8 | Sepeda Motor Sogun 125 | 2 | Unit |
| 9 | Portable Generating Set | 2 | Unit |
| 10 | Lemari Penyimpan | 2 | Unit |
| 11 | Lemari Besi / Metal | 1 | Unit |
| 12 | Lemari Kayu | 4 | Unit |
| 13 | Filing Cabinet Besi | 5 | Unit |
| 14 | Brandkas | 1 | Unit |
| 15 | Alat Penghancur Kertas | 1 | Unit |
| 16 | Mesin Absensi / Finger Print | 1 | Unit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Focusing Screen/Layar LCD Projecto | 2 | Unit |
| 18 | Meja Kerja Kayu | 11 | Unit |
| 19 | Kursi Besi/Metal | 51 | Unit |
| 20 | Meja Rapat | 4 | Unit |
| 21 | Kasur/Spring Bed | 1 | Unit |
| 22 | Kursi Tamu | 2 | Unit |
| 23 | Kursi Lipat | 15 | Unit |
| 24 | Filling Besi/Metal | 2 | Unit |
| 25 | Lemari Es | 1 | Unit |
| 26 | A.C. Window | 4 | Unit |
| 27 | A.C. Split | 3 | Unit |
| 28 | Kipas Angin | 7 | Unit |
| 29 | Televisi | 4 | Unit |
| 30 | Sound System | 1 | Unit |
| 31 | Camera Video | 1 | Unit |
| 32 | Kursi Kerja | 5 | unit |
| 33 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 1 | Unit |
| 34 | Video Tape Recorder Portable | 1 | Unit |
| 35 | Film Projector | 1 | Unit |
| 36 | Camera Digital | 1 | Unit |
| 37 | Alat Komunikasi Radio VHF Lain-Lain | 2 | Unit |
| 38 | Sprayer | 1 | Unit |
| 39 | Infrared Thermometer | 1 | Unit |
| 40 | P.C Unit | 8 | Unit |
| 41 | Lap Top | 13 | Unit |
| 42 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 1 | Unit |
| 43 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 9 | Unit |
| 44 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 1 | Unit |
| 45 | KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e | 1 | Unit |
| 46 | Genset | 1 | Unit |
| 47 | Mimbar/Podium | 1 | Buah |
| 48 | Pendopo | 1 | Unit |
| 49 | Gedung Kantor | 2 | Unit |
| 50 | Rumah Dinas | 1 | Unit |
| Prasarana | | | |
| 52 | Internet | 2 | 1 |
| 53 | Instalasi Listrik | 2.200 | 1 |

***Sumber Data : Kecamatan Pakuniran***

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakuniran

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakuniran yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Pakuniran telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Pakuniran dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

Target dan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 81.96 | 85.76 | 98.00 | - | - | 81.96 | 85.76 | 98.00 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 86.90 | 63.86 | 97.00 | - | - | 86.90 | 63.86 | 97.00 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 95.00 | 100 | 98.00 | - | - | 95.00 | 100.00 | 98.00 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | - | - | - | - | 100 | | | - | - | 92.00 | - | - | - | - | 92.00 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 | 69 | 70 | 70.01 | 71.76 | 72.05 | 86.25 | 87.50 | 87.51 | 89.70 | 97.36 |

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | **2,116,736,830.00** | **2,257,671,920.00** | **2,566,916,855.00** | **-** | **-** | **1,978,971,401.00** | **2,149,088,237.00** | **2,195,225,885.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **93.49** | **95.19** | **85.52** | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 14,260,000.00 | 10,500,000.00 | 13,240,000.00 | - | - | 14,260,000.00 | 8,847,500.00 | 6,825,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 84.26 | 51.55 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 5,260,000.00 | - | 2,310,000.00 | | | 5,260,000.00 | - | 975,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | #DIV/0! | 42.21 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | 1,500,000.00 | - | 1,155,000.00 | | | 1,500,000.00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | #DIV/0! | 0.00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | 1,500,000.00 | - | 1,155,000.00 | | | 1,500,000.00 | - | 975,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | #DIV/0! | 84.42 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | - | 1,500,000.00 | 1,155,000.00 | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | - | - | 1,155,000.00 | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | 4,155,000.00 | | | 3,000,000.00 | 5,897,500.00 | 2,925,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 98.29 | 70.40 | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,155,000.00 | | | 3,000,000.00 | 2,950,000.00 | 1,950,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 98.33 | 90.49 | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1,694,877,000.00 | 1,910,281,926.00 | 2,067,798,000.00 | - | - | 1,579,655,179.00 | 1,822,772,767.00 | 1,825,169,462.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.20 | 95.42 | 88.27 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | 1,635,377,000.00 | 1,833,305,926.00 | 2,042,340,000.00 | - | - | 1,532,905,179.00 | 1,760,776,585.00 | 1,803,304,462.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.73 | 96.04 | 88.30 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | 58,000,000.00 | 76,976,000.00 | 24,303,000.00 | - | - | 45,250,000.00 | 61,996,182.00 | 20,940,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 78.02 | 80.54 | 86.16 | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | 1,500,000.00 | - | 1,155,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | - | 925,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | #DIV/0! | 80.09 | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 46,749,786.00 | 49,993,375.00 | 110,018,791.00 | - | - | 40,911,200.00 | 44,840,750.00 | 77,792,445.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 87.51 | 89.69 | 70.71 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | 3,000,000.00 | 3,677,200.00 | 2,332,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 3,677,200.00 | 2,332,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 13,130,886.00 | 14,445,995.00 | 14,911,400.00 | - | - | 12,688,620.00 | 14,080,750.00 | 11,972,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96.63 | 97.47 | 80.29 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | 6,618,900.00 | 6,297,900.00 | 4,917,000.00 | - | - | 6,610,700.00 | 5,768,200.00 | 4,336,500.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.88 | 91.59 | 88.19 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | - | 15,000,000.00 | 17,937,500.00 | 20,309,100.00 | - | - | 11,635,080.00 | 17,474,600.00 | 19,287,445.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.57 | 97.42 | 94.97 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | - | 2,000,000.00 | 3,793,280.00 | 2,947,291.00 | - | - | 436,800.00 | - | 595,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.84 | 0.00 | 20.19 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | 7,000,000.00 | 3,841,500.00 | - | - | - | 6,540,000.00 | 3,840,000.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.43 | 99.96 | #DIV/0! | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | - | - | 64,602,000.00 | - | - | - | - | 39,269,500.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 60.79 | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 57,662,000.00 | 5,974,000.00 | 31,949,000.00 | | | 54,615,000.00 | 1,500,000.00 | 26,149,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 266.71 | 823.77 | 98.95 | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 57,662,000.00 | 5,974,000.00 | 18,100,000.00 | - | - | 54,615,000.00 | 1,500,000.00 | 12,300,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 266.71 | 823.77 | 98.95 | | |
| Pengadaan Mebel | - | - | - | - | 13,849,000.00 | - | - | - | - | 13,849,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 266.71 | 823.77 | 98.95 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 236,688,044.00 | 261,422,619.00 | 290,711,064.00 | - | - | 228,330,922.00 | 255,289,920.00 | 218,239,678.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96.47 | 97.65 | 75.07 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | 21,850,000.00 | 32,085,175.00 | 39,760,200.00 | | - | 17,651,070.00 | 29,830,027.00 | 31,725,566.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80.78 | 92.97 | 79.79 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 7,060,600.00 | 10,760,000.00 | 3,660,000.00 | | - | 7,060,600.00 | 10,760,000.00 | 3,660,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | 207,777,444.00 | 218,577,444.00 | 247,290,864.00 | | - | 203,619,252.00 | 214,699,893.00 | 182,854,112.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98.00 | 98.23 | 73.94 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 66,500,000.00 | 19,500,000.00 | 53,200,000.00 | - | - | 61,199,100.00 | 15,837,300.00 | 41,050,300.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92.03 | 81.22 | 77.16 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | 4,500,000.00 | 6,000,000.00 | 7,400,000.00 | | - | 2,253,500.00 | 2,337,300.00 | 2,050,300.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50.08 | 38.96 | 27.71 | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 27,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | - | 23,945,600.00 | 5,000,000.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 133.33 | 121.26 | | |
| Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | 35,000,000.00 | 8,500,000.00 | 40,800,000.00 | | - | 35,000,000.00 | 8,500,000.00 | 39,000,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | 100.00 | 95.59 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | **79,631,600.00** | **48,255,400.00** | **28,875,000.00** | **-** | **-** | **78,040,000.00** | **39,397,800.00** | **23,275,000.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **98.00** | **81.64** | **80.61** | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 67,540,000.00 | 37,361,800.00 | 16,075,000.00 | - | - | 66,140,000.00 | 29,001,800.00 | 15,890,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.93 | 77.62 | 98.85 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | - | 67,540,000.00 | 37,361,800.00 | 16,075,000.00 | - | - | 66,140,000.00 | 29,001,800.00 | 15,890,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.93 | 77.62 | 98.85 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 12,091,600.00 | 10,893,600.00 | 12,800,000.00 | - | - | 11,900,000.00 | 10,396,000.00 | 7,385,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98.42 | 95.43 | 57.70 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | - | - | 12,091,600.00 | 10,893,600.00 | 12,800,000.00 | - | - | 11,900,000.00 | 10,396,000.00 | 7,385,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98.42 | 95.43 | 57.70 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | - | - | - | | - | - | - | - | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | **187,950,000.00** | **405,881,550.00** | **62,300,000.00** | **-** | **-** | **183,408,300.00** | **376,624,600.00** | **45,405,000.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **97.58** | **92.79** | **72.88** | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 187,950,000.00 | 355,881,550.00 | 34,400,000.00 | - | - | 183,408,300.00 | 329,338,600.00 | 28,930,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.58 | 92.54 | 84.10 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | 177,850,000.00 | 339,943,350.00 | 12,600,000.00 | - | - | 173,308,300.00 | 313,686,200.00 | 10,350,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.45 | 92.28 | 82.14 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | - | 10,100,000.00 | 6,338,200.00 | - | - | - | 10,100,000.00 | 6,262,400.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 570.70 | 83.26 | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | - | - | 9,600,000.00 | 21,800,000.00 | - | - | - | 9,390,000.00 | 18,580,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.81 | 85.23 | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | - | - | - | 50,000,000.00 | - | - | - | - | 47,286,000.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.57 | #DIV/0! | | |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | - | 50,000,000.00 | - | - | - | - | 47,286,000.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.57 | #DIV/0! | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | 27,900,000.00 | - | - | - | - | 16,475,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 59.05 | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | - | 13,950,000.00 | - | - | - | - | 7,800,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.89 | | |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan | - | - | - | - | 13,950,000.00 | - | - | - | - | 8,675,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 62.19 | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | **46,226,914.00** | **51,094,800.00** | **98,252,300.00** | **-** | **-** | **89,766,880.00** | **44,883,440.00** | **94,443,000.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **194.19** | **87.84** | **96.12** | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 46,226,914.00 | 51,094,800.00 | 98,252,300.00 | - | - | 44,883,440.00 | 44,883,440.00 | 94,443,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.09 | 87.84 | 96.12 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | 46,226,914.00 | 51,094,800.00 | 98,252,300.00 | - | - | 44,883,440.00 | 44,883,440.00 | 94,443,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.09 | 87.84 | 96.12 | | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | **55,449,100.00** | **58,879,700.00** | **71,150,000.00** | **-** | **-** | **54,586,100.00** | **57,699,000.00** | **58,085,000.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **98.44** | **97.99** | **81.64** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 55,449,100.00 | 58,879,700.00 | 71,150,000.00 | - | - | 54,586,100.00 | 57,699,000.00 | 58,085,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98.44 | 97.99 | 81.64 | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | - | 55,449,100.00 | 58,879,700.00 | 71,150,000.00 | - | - | 54,586,100.00 | 57,699,000.00 | 58,085,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.52 | 97.99 | 81.64 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | - | - | - | 9,100,000.00 | - | - | - | - | 6,420,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.52 | #DIV/0! | 70.55 | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | - | - | - | - | 9,100,000.00 | - | - | - | - | 6,420,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.52 | #DIV/0! | 70.55 | | |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | - | - | - | 2,600,000.00 | - | - | - | - | 2,470,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.52 | #DIV/0! | 95.00 | | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.52 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa | - | - | - | - | 6,500,000.00 | - | - | - | - | 3,950,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 60.77 | | |
| **Jumlah** | **-** | **-** | **2,485,994,444.00** | **2,821,783,370.00** | **2,836,594,155.00** | **-** | **-** | **2,384,772,681.00** | **2,667,693,077.00** | **2,422,853,885.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **95.93** | **94.54** | **85.41** | | |

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah Kecamatan Pakuniran :

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pakuniran

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan :

- **Keterbatasan Sumber Daya** : Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur** : Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.
- **Birokrasi yang Kaku** : Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.

- **Akses dan Kesenjangan Digital** : Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah** : Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital** : Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar-Sektor** : Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur** : Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu** : Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat** : Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pakuniran

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Pakuniran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

**Tabel 2.6**

**Isu Strategis Kecamatan Pakuniran**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti kawasan pegunungan | Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br><br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br><br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, serta kehutanan | Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

***Sumber Data : Kecamatan Pakuniran***

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakuniran Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Pakuniran Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakuniran, dalam hal ini Kecamatan Pakuniran diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang

tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Pakuniran Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

**Gambar 3.1**

**Konsep Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo**

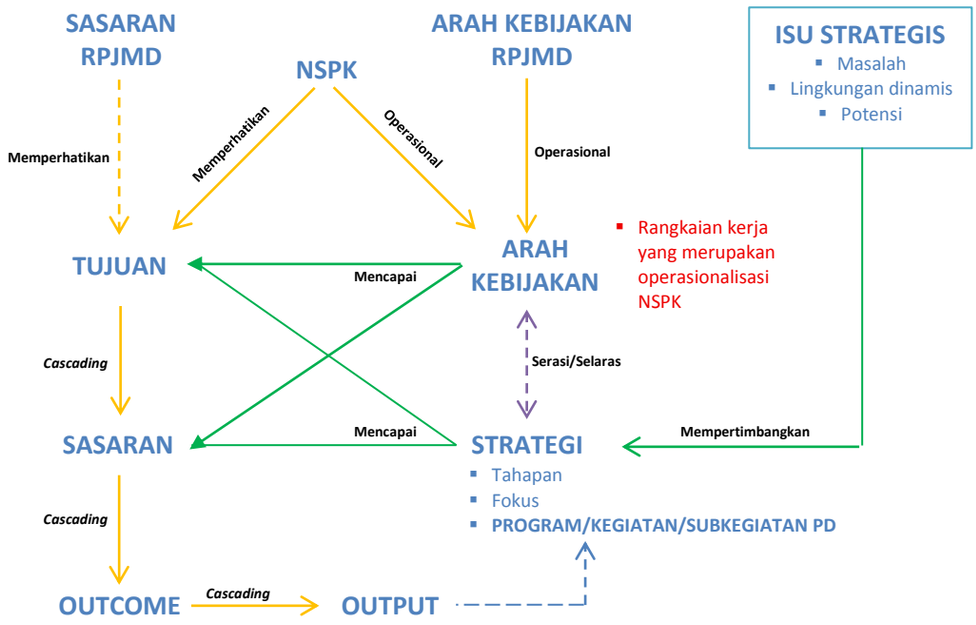


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan

Pakuniran Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.2**

**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**

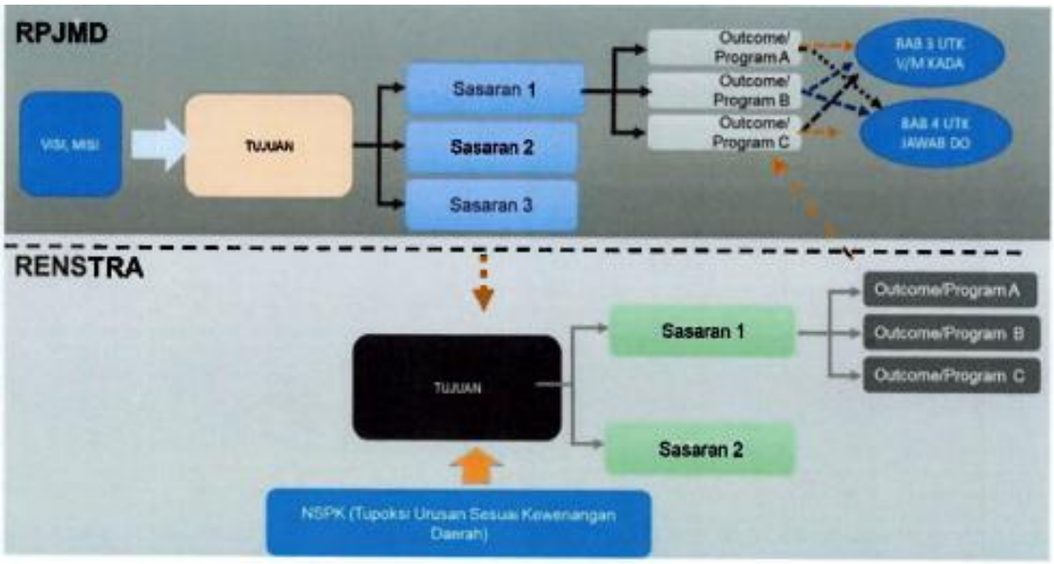


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.1**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakuniran**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pakuniran** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 87,06 | 87,93 | 88,81 | 89,70 | 90,59 | 91,50 | 92,42 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, diperlukan Misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakuniran

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

**Tabel 3.1.2**

**Definisi Operasional IKU Kecamatan Pakuniran**

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut :<br>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | |
| 3. | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai hasil atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1)<br>———————————— X 100<br>Nilai LHE AKIP tahun (n-1)<br><br>Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Pakuniran***

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pakuniran dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Pakuniran dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis

data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

## B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Pakuniran

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Pakuniran dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Kecamatan Pakuniran**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

***Sumber Data : Kecamatan Pakuniran***

## C. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Pakuniran

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Pakuniran sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Pakuniran :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Pakuniran dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Pakuniran, sebagai berikut

**Tabel 3.3**

**Arah Kebijakan Kecamatan Pakuniran**

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul; | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

***Sumber Data : Kecamatan Pakuniran***

# BAB IV

# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahun, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman,

ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

## Tabel 4.1

## Program Kecamatan Pakuniran

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.596.625.389,37 | | 2.625.482.482,12 | | 2.664.610.601,05 | | 2.718.980.588,57 | | 2.782.737.698,12 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.440.335.389,37 | | 2.467.455.583,52 | | 2.504.228.594,25 | | 2.555.326.070,71 | | 2.615.245.661,49 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,05 | 72,09 | 72,12 | 2.440.335.389,37 | 72,16 | 2.467.455.583,52 | 72,19 | 2.504.228.594,25 | 72,23 | 2.555.326.070,71 | 72,27 | 2.615.245.661,49 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 10.200.000 | | 10.313.355,72 | | 10.467.057,84 | | 10.680.632,68 | | 10.931.081,79 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 10.200.000 | 100 | 10.313.355,72 | 100 | 10.467.057,84 | 100 | 10.680.632,68 | 100 | 10.931.081,79 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 23.400.000 | | 23.660.051,36 | | 24.012.662,1 | | 24.502.627,92 | | 25.077.187,65 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 23.400.000 | 100 | 23.660.051,36 | 100 | 24.012.662,1 | 100 | 24.502.627,92 | 100 | 25.077.187,65 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 66.890.000 | | 67.633.369,04 | | 68.641.323,4 | | 70.041.913,75 | | 71.684.319,73 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 66.890.000 | 100 | 67.633.369,04 | 100 | 68.641.323,4 | 100 | 70.041.913,75 | 100 | 71.684.319,73 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 47.400.000 | | 47.926.770,71 | | 48.641.033,48 | | 49.633.528,36 | | 50.797.380,1 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 47.400.000 | 100 | 47.926.770,71 | 100 | 48.641.033,48 | 100 | 49.633.528,36 | 100 | 50.797.380,1 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 8.400.000 | | 8.493.351,77 | | 8.619.929,98 | | 8.795.815,15 | | 9.002.067,36 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 8.400.000 | 100 | 8.493.351,77 | 100 | 8.619.929,98 | 100 | 8.795.815,15 | 100 | 9.002.067,36 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2596625389.37 | | 2625482482.12 | | 2664610601.05 | | 2718980588.57 | | 2782737698.12 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakuniran

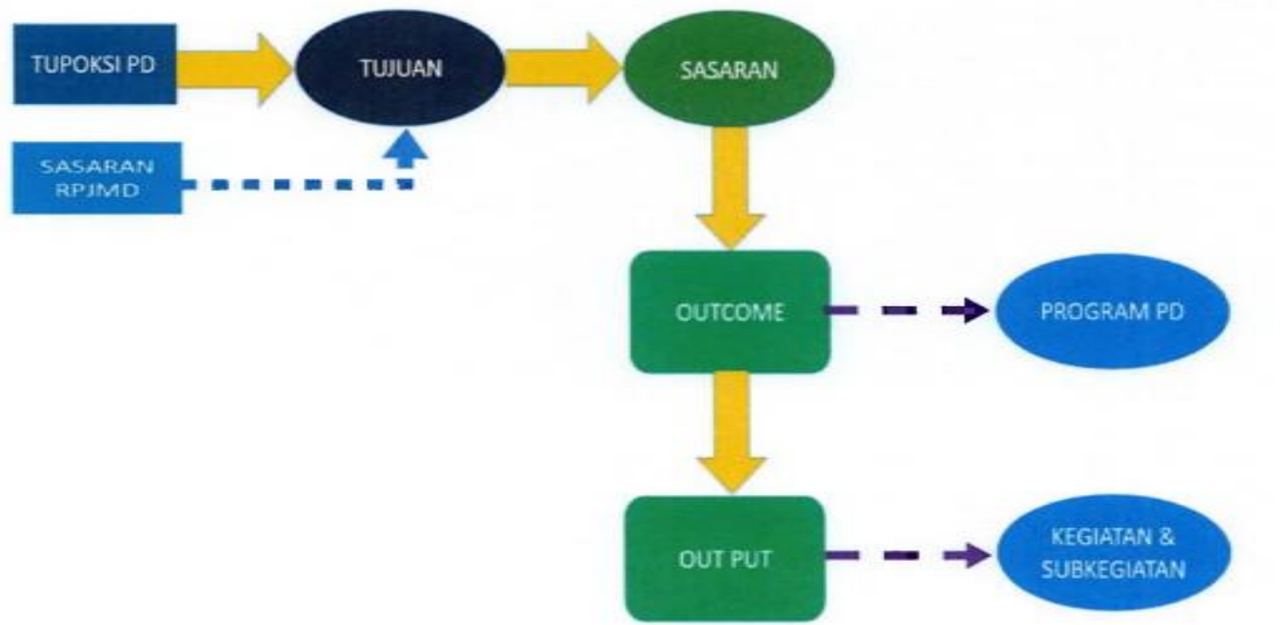

**Tabel 4.2**

## Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Pakuniran

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pakuniran** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi pelayanan publik yang inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disediakan (Paket) | Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kantor yang Disediakan (Laporan) | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pemerintahan Desa | | Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2.1**

**Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Pakuniran**

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Pakuniran***

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pakuniran**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.596.625.389,37 | | 2.625.482.482,12 | | 2.664.610.601,05 | | 2.718.980.588,57 | | 2.782.737.698,12 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.440.335.389,37 | | 2.467.455.583,52 | | 2.504.228.594,25 | | 2.555.326.070,71 | | 2.615.245.661,49 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,05 | 72,12 | 2.440.335.389,37 | 72,16 | 2.467.455.583,52 | 72,19 | 2.504.228.594,25 | 72,23 | 2.555.326.070,71 | 72,27 | 2.615.245.661,49 | 7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pakuniran | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) | 8 | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.000.000 | | |
| 7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) | 8 | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.000.000 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.120.800.000 | | 2.120.800.000 | | 2.120.800.000 | | 2.120.800.000 | | 2.150.800.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 12 | 2.120.800.000 | 12 | 2.120.800.000 | 12 | 2.120.800.000 | 12 | 2.120.800.000 | 12 | 2.150.800.000 | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.120.000.000 | | 2.120.000.000 | | 2.120.000.000 | | 2.120.000.000 | | 2.150.000.000 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 12 | 2.120.000.000 | 12 | 2.120.000.000 | 12 | 2.120.000.000 | 12 | 2.120.000.000 | 12 | 2.150.000.000 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 800.000 | | 800.000 | | 800.000 | | 800.000 | | 800.000 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 2 | 800.000 | 2 | 800.000 | 2 | 800.000 | 2 | 800.000 | 2 | 800.000 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 47.000.000 | | 47.000.000 | | 65.300.000 | | 71.490.681,34 | | 92.410.272,12 | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | 47.000.000 | 4 | 47.000.000 | 4 | 65.300.000 | 4 | 71.490.681,34 | 4 | 92.410.272,12 | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Laporan) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 8.000.000 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 8.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 6 | 6 | 7.000.000 | 6 | 7.000.000 | 6 | 7.000.000 | 6 | 7.000.000 | 6 | 7.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 6 | 22.000.000 | 6 | 22.000.000 | 6 | 22.000.000 | 6 | 22.000.000 | 6 | 22.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.300.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | 10 | 2.000.000 | 10 | 2.000.000 | 10 | 2.300.000 | 10 | 2.000.000 | 10 | 2.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 16.000.000 | | 22.490.681,34 | | 37.410.272,12 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 16.000.000 | 12 | 22.490.681,34 | 12 | 37.410.272,12 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 5.000.000 | | 36.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 2 | 5.000.000 | 3 | 36.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | 36.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 2 | 5.000.000 | 3 | 36.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 255.535.389,37 | | 251.655.583,52 | | 261.128.594,25 | | 261.035.389,37 | | 265.035.389,37 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 255.535.389,37 | 12 | 251.655.583,52 | 12 | 261.128.594,25 | 12 | 261.035.389,37 | 12 | 265.035.389,37 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 24.500.000 | | 20.620.194,15 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 24.500.000 | 12 | 20.620.194,15 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.093.204,88 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 10 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.093.204,88 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 221.035.389,37 | | 221.035.389,37 | | 221.035.389,37 | | 221.035.389,37 | | 225.035.389,37 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 221.035.389,37 | 12 | 221.035.389,37 | 12 | 221.035.389,37 | 12 | 221.035.389,37 | 12 | 225.035.389,37 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 24.000.000 | | 59.000.000 | | 64.000.000 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 9.000.000 | 2 | 9.000.000 | 2 | 24.000.000 | 2 | 59.000.000 | 2 | 64.000.000 | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.000.000 | 8 | 4.000.000 | 8 | 4.000.000 | 8 | 4.000.000 | | |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 8.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7 | 7 | 2.000.000 | 7 | 2.000.000 | 7 | 8.000.000 | 7 | 15.000.000 | 7 | 15.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 10.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 10.200.000 | | 10.313.355,72 | | 10.467.057,84 | | 10.680.632,68 | | 10.931.081,79 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 10.200.000 | 100 | 10.313.355,72 | 100 | 10.467.057,84 | 100 | 10.680.632,68 | 100 | 10.931.081,79 | 7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pakuniran | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 4.200.000 | | 4.313.355,72 | | 4.467.057,84 | | 4.680.632,68 | | 4.931.081,79 | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 12 | 4 | 4.200.000 | 4 | 4.313.355,72 | 4 | 4.467.057,84 | 4 | 4.680.632,68 | 4 | 4.931.081,79 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 4.200.000 | | 4.313.355,72 | | 4.467.057,84 | | 4.680.632,68 | | 4.931.081,79 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 12 | 4 | 4.200.000 | 4 | 4.313.355,72 | 4 | 4.467.057,84 | 4 | 4.680.632,68 | 4 | 4.931.081,79 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 2 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | | |
| 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 2 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 23.400.000 | | 23.660.051,36 | | 24.012.662,1 | | 24.502.627,92 | | 25.077.187,65 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan | 100 | 100 | 23.400.000 | 100 | 23.660.051,36 | 100 | 24.012.662,1 | 100 | 24.502.627,92 | 100 | 25.077.187,65 | 7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pakuniran | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dan lingkungan | Desa/ Kelurahan (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 15.400.000 | | 15.660.051,36 | | 16.012.662,1 | | 16.502.627,92 | | 17.077.187,65 | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 15.400.000 | 2 | 15.660.051,36 | 2 | 16.012.662,1 | 2 | 16.502.627,92 | 2 | 17.077.187,65 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 2 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 9.400.000 | | 9.660.051,36 | | 10.012.662,1 | | 10.502.627,92 | | 11.077.187,65 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 9.400.000 | 2 | 9.660.051,36 | 2 | 10.012.662,1 | 2 | 10.502.627,92 | 2 | 11.077.187,65 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 100 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 100 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 66.890.000 | | 67.633.369,04 | | 68.641.323,4 | | 70.041.913,75 | | 71.684.319,73 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 66.890.000 | 100 | 67.633.369,04 | 100 | 68.641.323,4 | 100 | 70.041.913,75 | 100 | 71.684.319,73 | 7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pakuniran | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 66.890.000 | | 67.633.369,04 | | 68.641.323,4 | | 70.041.913,75 | | 71.684.319,73 | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 100 | 100 | 66.890.000 | 100 | 67.633.369,04 | 100 | 68.641.323,4 | 100 | 70.041.913,75 | 100 | 71.684.319,73 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 61.890.000 | | 62.633.369,04 | | 63.641.323,4 | | 65.041.913,75 | | 66.684.319,73 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | 5 | 61.890.000 | 5 | 62.633.369,04 | 5 | 63.641.323,4 | 5 | 65.041.913,75 | 5 | 66.684.319,73 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 100 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 47.400.000 | | 47.926.770,71 | | 48.641.033,48 | | 49.633.528,36 | | 50.797.380,1 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 47.400.000 | 100 | 47.926.770,71 | 100 | 48.641.033,48 | 100 | 49.633.528,36 | 100 | 50.797.380,1 | 7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pakuniran | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 47.400.000 | | 47.926.770,71 | | 48.641.033,48 | | 49.633.528,36 | | 50.797.380,1 | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 100 | 10 | 47.400.000 | 100 | 47.926.770,71 | 100 | 48.641.033,48 | 100 | 49.633.528,36 | 100 | 50.797.380,1 | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 47.400.000 | | 47.926.770,71 | | 48.641.033,48 | | 49.633.528,36 | | 50.797.380,1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 100 | 10 | 47.400.000 | 100 | 47.926.770,71 | 100 | 48.641.033,48 | 100 | 49.633.528,36 | 100 | 50.797.380,1 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 8.400.000 | | 8.493.351,77 | | 8.619.929,98 | | 8.795.815,15 | | 9.002.067,36 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 8.400.000 | 100 | 8.493.351,77 | 100 | 8.619.929,98 | 100 | 8.795.815,15 | 100 | 9.002.067,36 | 7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pakuniran | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 8.400.000 | | 8.493.351,77 | | 8.619.929,98 | | 8.795.815,15 | | 9.002.067,36 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 17 | 17 | 8.400.000 | 17 | 8.493.351,77 | 17 | 8.619.929,98 | 17 | 8.795.815,15 | 17 | 9.002.067,36 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 17 | 17 | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 | | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | 4.400.000 | | 4.493.351,77 | | 4.619.929,98 | | 4.795.815,15 | | 5.002.067,36 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 17 | 17 | 4.400.000 | 17 | 4.493.351,77 | 17 | 4.619.929,98 | 17 | 4.795.815,15 | 17 | 5.002.067,36 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 17 | 17 | 4.000.000 | 17 | 4.000.000 | 17 | 4.000.000 | 17 | 4.000.000 | 17 | 4.000.000 | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas. Penetapannya berlandaskan pada isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kemampuan pendanaan daerah. Secara eksplisit, Program Prioritas Kecamatan Pakuniran dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pakuniran** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | SAE KERJA |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis

secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakuniran sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakuniran**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| | 7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pakuniran | | | | | | | | | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 91,00 | |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 87,06 | 87,93 | 88,81 | 89,7 | 90,59 | 91,5 | 92,42 | |
| 3. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pakuniran sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pakuniran**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | | | | | | | | | | |
| | **NIHIL** | | | | | | | | | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Pakuniran.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Pakuniran.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Pakuniran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Pakuniran.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Pakuniran. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;

2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;
3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

Pakuniran, 22 September 2025
Plt. CAMAT PAKUNIRAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

KECAMATAN PAKUNIRAN

**HASAN ZAINURI, S.Ag. MM**
Pembina
NIP. 19750930 200312 1 002

# RENCANA STRATEGIS

## KECAMATAN SUMBER

## KABUPATEN PROBOLINGGO

## TAHUN 2025 - 2029

## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

## KECAMATAN SUMBER

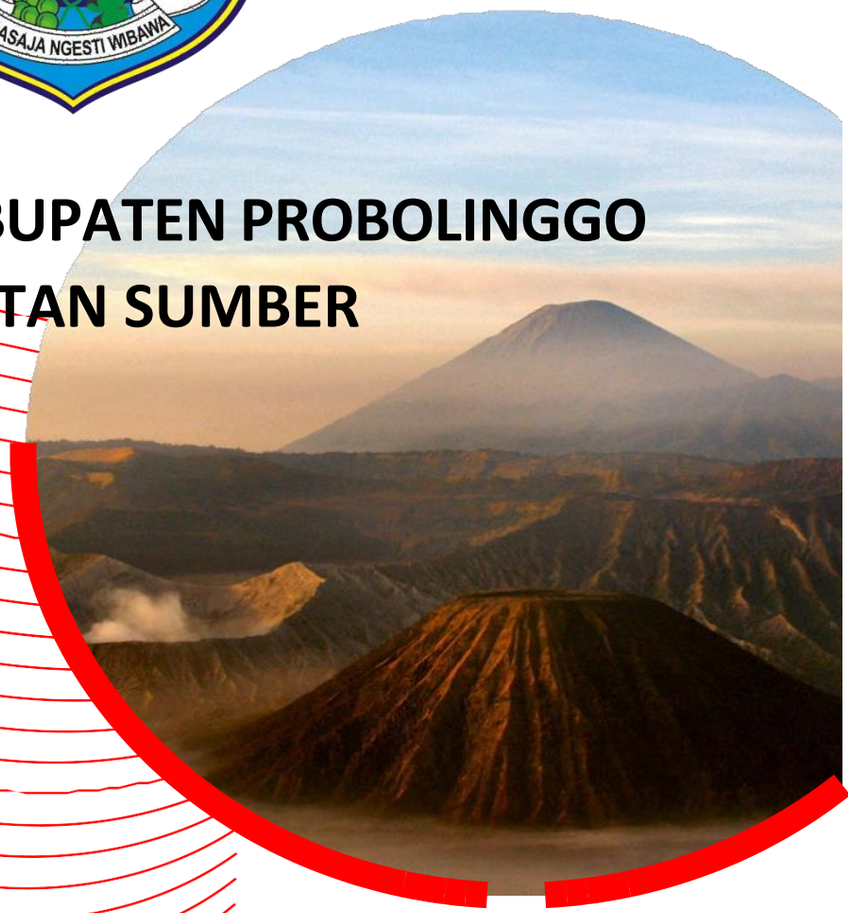

## TAHUN 2025

# KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, rnarilah kita bersarna-sarna tetap rnelaksanakan amanah dalam bidang tugas kita maslng-maslng bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai.Rencana Strategis Kecamatan Sumber Tahun 2025-2029 disusun untuk rnemberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecarnatan Sumber Kabupaten Probolinggo tahun2025– 2029 ini rnengacu pada visi, misi dan program Bupati Probolinggo yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan sernoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo,23 September 2025

**Camat Sumber**

**NUR RACHMAD SHOLEH, S.STP.,M.Si**
Pembina
NIP. 19861015 200412 1 002

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **ii**

**BAB I** ..... 1

**PENDAHULUAN** ..... 1

**1.1 Latar Belakang** ..... 1

**1.2 Dasar Hukum Penyusunan** ..... 2

**1.3 Maksud danTujuan** ..... 5

**1.4 Sistematika Penulisan** ..... 5

**BAB II** ..... 7

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN** ..... 7

**DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** ..... 7

**2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sumber** ..... 7

**2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** ..... 19

**BAB III** ..... 23

**TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... 23

**3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sumber Tahun 2025-2029** ..... 23

**3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sumber Tahun 2025-2029** ..... 23

**3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan SumberTahun 2025-2029** ..... 29

**3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan SumberTahun 2025-2029** ..... 30

**BAB IV** ..... 34

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** ..... 33

**4.1 Uraian Program** ..... 33

**4.2 Uraian Kegiatan** ..... 34

**BAB V** ..... 49

**PENUTUP** ..... 49

# DAFTAR TABEL

*Tabel 2.1.b.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Sumber Berdasarkan pangkat dan Golongan tahun 2025*

*Tabel 2.1.b.2 Jumlah Sarana Prsasarana Kecamatan Sumber Tahun 2025*

*Tabel 2.1.c Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumber*

*Tabel 2.2 Isu Strategis Kecamatan Sumber*

*Tabel 3.2.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sumber*

*Tabel 3.3 Penahapan Rencana Strategis (Renstra)*

*Table 3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) dan Pendanaan*

*Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukug Program Prioritas Pembangunan Daerah*

*Table 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah*

*Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci*

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumber Tahun 2025 - 2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Sumber yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumber yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Sumber sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Sumber juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Probolinggo, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

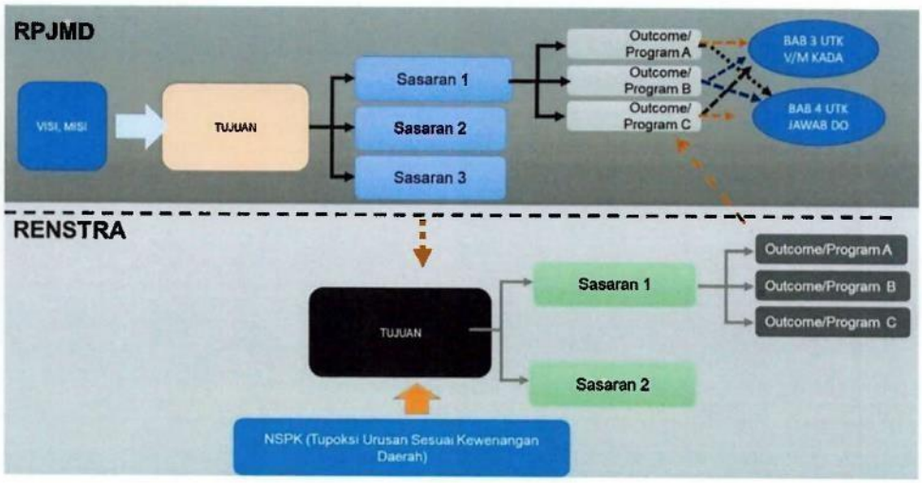


Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Sumber yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Probolinggo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumber. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumber dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-UndangNomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 90Tahun2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan ke Tiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2024-2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentangPembentukan dan SusunanPerangkat
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2045;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender;
35. Peraturan Daerah Kabupaten ProbolinggoNomor5Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 1 Seri D;
36. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo;
37. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 19 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten ProbolinggoTahun 2026;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Sumber Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Sumber Tahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 kedalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis,

   Peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Sumber ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumber sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sumber

### a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sumber

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada DaerahKota/ Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/ Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatnnya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan Sumber

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan tentang Kedudukan Kabupaten Probolinggo, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Sumber :

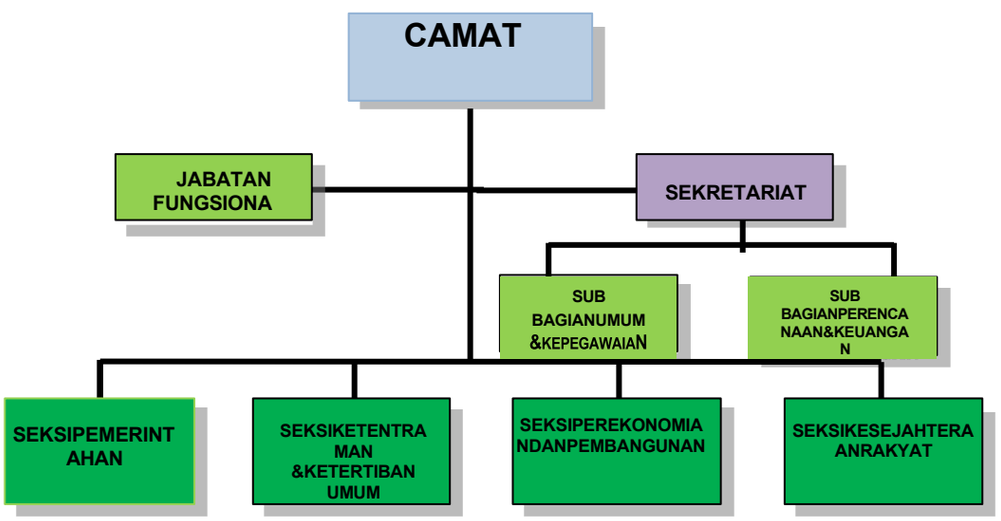

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Sumber Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tatakerja sebagai berikut:

**1. CAMAT**

(1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Camat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

(1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedu r(SOP);
g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumidan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

3. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi:

a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga,kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dantatalaksana;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

4. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tu gas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/ kegiatan/ anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. Penyusunan administrasi rencana program/ kegiatan/ anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/ kegiatan/ anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan; pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;

e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

5. **Kepala Seksi Pemerintahan**

(1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aya t(1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

(1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

c. persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

d. pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kegiatan survey,riset,penelitian dan kuliah kerja nyata.

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. Kepala Seksi Perekonomiandan Pembangunan**

(1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomia nyang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan

dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan ,perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;

e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) diwilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidupserta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APB Desa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

8. **Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat**

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat.

(2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olah raga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja,

pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. Kelompok Jabatan Fungsional**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kecamatan dan Kelurahan.

(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sumber

Struktur Organisasi Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No.14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat.
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Berikut merupakan data pegawai Kecamatan Sumber Tahun 2025 tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.b.1
Data Pegawai Kecamatan Sumber

| No | Uraian | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-LAki | Perempuan | Total |
| I | Pegawai PNS | 14 | - | 14 |
| II | Pegawai CPNS | 0 | - | - |
| III | Pegawai PPPK | 1 | - | 1 |
| IV | Non PNS | 3 | - | 3 |
| V | Tingkat Pendidikan CPNS dan PNS: | | | |
| | 1.SLTA | 4 | - | 4 |
| | 2.D-3 | `- | - | - |
| | 3.D-4 | `- | - | |
| | 4.S1 | 6 | - | 6 |
| | 5.S2 | 4 | - | 4 |
| VI | Golongan Kepangkatan CPNS dan PNS: | | | |
| | 1.IIa | - | - | - |
| | 2.IIb | `- | - | - |
| | 3.IIc | `- | - | - |
| | 1.IId | 4 | | 4 |
| | 2.IIIa | 1 | - | 1 |
| | 3.IIIb | 1 | | 1 |
| | 4.IIIc | 3 | - | 3 |
| | 5.IIId | 4 | - | 4 |
| | 9.IVa | 1 | | 1 |
| | 10.IVb | - | - | - |
| VII | Golongan PPPK: | - | - | - |
| | | | | |
| V | Agama: | | | |
| | Islam | 15 | - | 15 |
| | Katolik | - | - | |
| | Budha | - | - | |
| | Hindu | - | - | |
| | Lainnya | - | - | |
| VI | Pejabat struktural | - | - | |
| **VII** | **Fungsional umum/ Staf** | | | |

Sumber data:Kecamatan Sumber 2025

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Sumber terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo Jalan Raya Sumber No. 92Sumber Kabupaten Probolinggo. Berikut merupakan sarana dan prasarana Kecamatan Sumber :

Tabel 2.1.b.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Sumber

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak Berat (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| **Sarana** | | | | |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lain-lain Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Lain-lain tugu/tanda batas | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Portable Generating Set | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Genset | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Kursi Kerja | 17 | 16 | 1 |
| 10 | Kursi Lipat | 15 | 13 | 2 |
| 11 | P.C Unit | 8 | 8 | 0 |
| 12 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 16 | 12 | 4 |
| 13 | Sepeda Motor | 8 | 7 | 1 |
| 14 | Sport Utility Vehicle (SUV) | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Mesin Fotocopy Double Folio | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Lemari Besi/Metal | 4 | 2 | 2 |
| 17 | Lemari Kayu | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Filing Cabinet Besi | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Brandkas | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Alat Penghancur Kertas | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Mesin Absensi | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Rak Besi | 4 | 4 | 0 |
| 23 | Papan Pengumuman | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Meja Kerja Kayu | 7 | 7 | 0 |
| 25 | Kursi Besi/Metal | 28 | 28 | 0 |
| 26 | Meja Rapat | 9 | 9 | 0 |
| 27 | Meja Tamu Biasa | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Meja Resepsionis | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Meja 1/2 Biro | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Kasur/Spring Bed | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Kursi Tamu | 7 | 7 | 0 |
| 32 | Bangku Tunggu | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Filling Besi/Metal | 2 | 2 | 0 |
| 34 | Lemari Es | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Tempat Tidur Besi | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Tempat Tidur Kayu | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Meja Makan Besi | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Tabung Gas | 2 | 2 | 0 |
| 39 | Televisi | 5 | 5 | 0 |
| 40 | Mesin Pemotong Rumput | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Sound System | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Speaker Komputer | 2 | 2 | 0 |
| 43 | Dispenser | 3 | 3 | 0 |
| 44 | Mimbar/Podium | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Karpet | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Gordyin/Kray | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Mesin Pompa Air | 2 | 2 | 0 |
| 48 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 2 | 2 | 0 |
| 49 | Meja Kerja Pejabat | 2 | 2 | 0 |
| 50 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 7 | 7 | 0 |
| 51 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 | 2 | 0 |
| 52 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 8 | 8 | 0 |
| 53 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Camera Electronic | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Layar Film/Projector | 2 | 2 | 0 |
| 56 | Microphone/Wireless Mic | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Alat Studio lainnya | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Tripod | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Lap Top | 15 | 15 | 0 |
| 60 | Note Book | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 2 | 2 | 0 |
| 62 | External/ Portable Hardisk | 3 | 3 | 0 |
| 63 | Hard disk Eksternal | 7 | 7 | 0 |
| 64 | Handtruck Troly Plastics | 4 | 4 | 0 |
| 65 | Radio | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Rice Cooker (Alat Dapur) | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1 | 0 | 1 |
| **Prasarana** | | | | |
| 1 | Internet | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Instalasi Listrik | 2 | 2 | 0 |
| | | | | |

**c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumber**

Kecamatan Sumber menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan,terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Sumber dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **baik** dengan **rasio**

**capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa

target yang ditetapkan oleh Kecamatan Sumber berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 80,11(2021) menjadi 80,48(2024), dengan capaian100% setiap tahun sejak 2022.
- **Persentase pelayanan sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 80% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator **nilai SAKIP** dan **reformasi birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian NA di Tahun 2024 yaitu 70,05, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data perbandingan antara realisasi dan capaian berbasis kinerja dengan realisasi dan capaian berbasis Anggaran di dalam Indikator kinerja (IKU) kecamatan Sumber yaitu:

- IKU Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas dengan target 100%, capaian kinerja 86,63% dengan capaian realisasi anggaran 93,61%dengan tingkat efisiensi -6,98%. kategori belum efisien.
- IKU Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi target 100%, capaian kinerja 66,70% dengan capaian realisasi anggaran 87,73%dengan tingkat efisiensi - 21,06% kategori belum efisien.
- IKU Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan target 100%, capaian kinerja 85% dengan capaian realisasi anggaran 99,80% dengan tingkat efisiensi -4,8% kategori belum efisien
- IKU Persentase desa/kelurahan yang telah dibina target 100%, capaian kinerja 85% dengan capaian realisasi anggaran 85% dengan tingkat efisiensi 11,47% kategori efisien**,** kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan tugas - tugas pelimpahan yang dilaksanakan oleh kecamatan
- IKU Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah target 0,5%, realisasi dan capaian nilai AKIP Tahun 2024 oleh APIP di Bulan Maret 2025 yaitu 70,05.

  Secara keseluruhan, Kecamatan Sumber menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

## Tabel 2.1.1.c
## Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumber

| No | Indikator Kinerjasesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | SPM | Target Indikato r Lainnya | Realisasi 2020 | Target Renstra perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | Realisasi CapaianTahun Ke- | | | | Rasio Capaian padaTahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | | | | | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28,22% | 93,79% | 86,63% | 90,09% | 0,28% | 0,93% | 0,86% | 0,90% | 5,7% | 81% |
| 2 | Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan | | | | | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99,99% | 91.84% | 85,00% | 95% | 0,99% | 0,91% | 0,85% | 0,95% | 0,95% | 90% |
| 3 | Persentaseketen tramandanketerti banumumyangte rfasilitasi | | | | | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99,97% | 100% | 66,73% | 99,00% | 0,99% | 0,01% | 0,99% | 0.66% | 2,10% | 93% |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | | | | | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah | | | | | 71,24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95,74 | 85,97 | 94,00% | 71,26 | 0,95 | 0,85 | 0,94 | 0,71 | 2,5% | 71 |

Kecamatan Sumber menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai mendekati target, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka **84,28,** serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, , umumnya berkinerja "**Baik"**. Kecamatan Sumber telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

**d. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Sumber**

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tingga ldi kecamatan,termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi

membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus

menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumber dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.2
## Isu Strategis Kecamatan Sumber

| POTENSI DAERAHYANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISUSTRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Potensi Pertanian dan Perkebunan | Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan Publik | Pengelolaan Sumber Daya Air :<br>- Ketersediaan air sungai di wilayah Smber perlu dikaji;<br>- Pencemaran air oleh limbah rumah tangga, pertanian,atau industri harus menjadi perhatian. | Desentralisasi dan Otonomi Daerah | Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan | KeterbatasanKewenangan Kecamatan | Belum Optimalnya Penyelanggaraan Pelayanan Kecamatan |
| Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa | Pengelolaan Sampah:<br>- Pengelolaan sampah di tingkat desa dan kecamatan perlu diperhatikan, isu sampah yangtidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingukngan dan mengganggu ksehatan. | Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal | Kualitasdan Kapasitas Aparatur Kecamatan | Disparitas Antar Wilayah | Belum Optimalnya SinkronisasiTata Kelola Desa |
| Potensi Wisata | | Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi:<br>- Kabupaten Probolinggo terkenal dengan Angin Gending yang datang saat musim kemarau, yang bisa menjadi isu perubahan iklim dan bencana alam. | Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan | Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor | KetimpanganAnggarandan Pembinaan dari Kabupaten | |
| Potensi Sumber Daya Manusia | | Keanekaragaman Hayati dan Alam:<br>- Perubahan penggunaan lahan dan ampak terhadap keanekaragaman hayati juga dapatmenjadi fokus, seperti perubahan fungi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan. | Digitalisasi dan Pelayanan Publik | Pelayanan Publik Yang Belum Optimal | Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu | |
| Potensi Desa Wisata dan Agrowisata | | Dampak Kegiatan Ekonomi Lokal:<br>- Keigatan eonomi di Keecamatan Sumber, seperti pertanian, pternakan, atau potensi pengembangan pariwisata, dapat memiliki dampak lingkungan yang perlu dianalisis. | Resiliensi Pemerintahan Lokalterhadap Krisis | Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi | KetergantunganpadaDesadalam Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| Potensi Ketahanan Pangandan Lingkungan untuk mewujudkan swasembada pangan Nasional | | Adanya banjir dan Tanah longsor yang terjadi di berbagai titik Desa di Kecamatan Sumber . | Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan | Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan | Lemahnya Implementasi e- Government | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Layanan pencegahan proteksi kebakaran belum dilakukan dengan optimal di Kecamatan Sumber, | Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat | Partisipasi Masyarakatdan Pengawasan Sosial | Partisipasi Masyarakat dan Transparansi | |
| | | Adanya bangunan liar di Kecamatan Sumber | | Penanganan Konflik Sosial dan Bencana | | |
| | | Masih adanya kasus stunting di Kecamatan Sumber | | | | |
| | | Rendahnya perlindungan anak dan perempuan dari Kekerasan di Kecamatan Sumber | | | | |
| | | Menurunnya nilai wawasan kebangsaan generasi muda (di seluruh Kabupaten Probolinggo). | | | | |

# BAB III
# TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sumber Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sumber Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan Sumber menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***. Tujuan tersebut selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: "***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumber, dalam hal ini Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sumber Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sumber menetapkan sasaran strategi”Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumber tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.2.1 Konsep Renstra Kecamatan Sumber

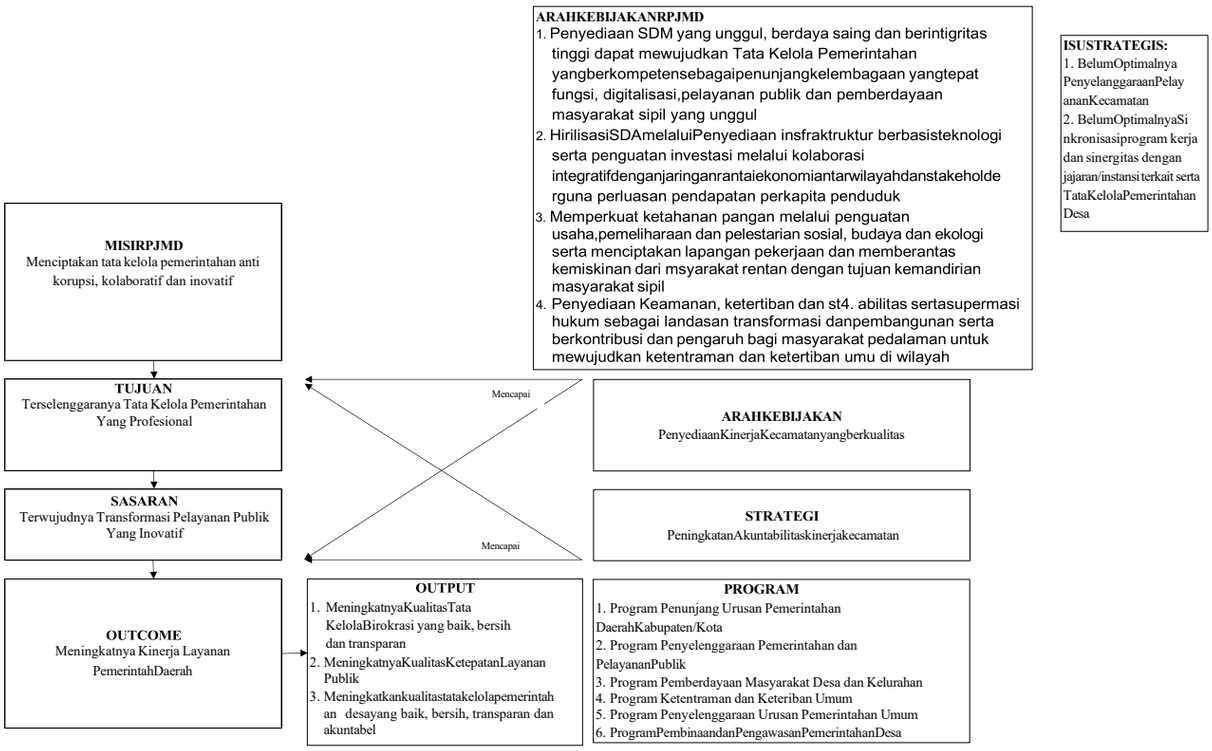


RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Sumber yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah ecara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah

3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

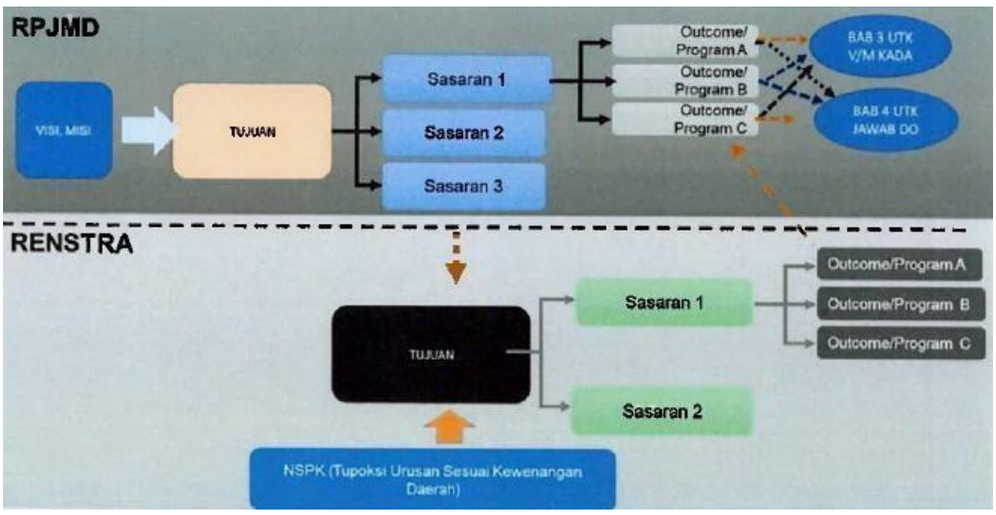


## 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra)

**Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumber** adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. **Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :**

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (**Specific**,**Measurable**,**Achievable,Relevant,Time-bound**) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sumber dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sumber

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Sumber** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 80,48 | 81,28 | 82,09 | 82,89 | 83,70 | 84,50 | 85,31 | |

Keterangan:

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Serta memperhatikan Devinisi Operasional sudah ditetapkan dengan perhitungan rumus yang telah ditentukan.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan,seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.2.2 Strategi PD dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumber Tahun 2025-2029 (Isi diambil dari T-C 26)

| VISI : **TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO SAE, SEJAHTERA, AMANAH RELIGIUS SERTA EXSIS BERDAYA SAING** | | | |
|---|---|---|---|
| MISI1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif | | | |
| **TUJUAN / INDIKATOR** | **SASARAN / INDIKATOR** | **STRATEGI** | **ARAHKEBIJAKAN** |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan PublikYang Inovatif<br><br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah<br>Indikator :<br>Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah<br>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan | Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan` | 1 Penguatan Sistem Perencanaan dan pengukuran Kinerja<br>2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan<br>3 PemanfaatanTeknologi Informasi<br>4 Transparansi dan Pelibatan Publik<br>5 Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan kecamatan | 1 Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik<br>2 Digitalisasi Layanan BerbasisTeknologi<br>3 Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting<br>4 Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran<br>5 PembangunanBerbasis KebutuhanNyata Masyarakat |
| | | Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat di kecamatan | 1 Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses<br>2 PenjaminanTindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan<br>3 Peningkatan Kapasitas |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4<br>5 | Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan<br>Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik<br>Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas |

### 3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumber Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

**Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Sumbe r**sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

**Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Sumber:**

1. Meningkatkan **ketepatan sasaran** program/kegiatan.
2. Mempermudah **koordinasi antar perangkat daerah**.
3. Mendukung **pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah**.
4. Menunjang **penggunaan sistem informasi pembangunan daerah**.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Digitalisasidan Teknologi (penguatan aksesinternet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik) | Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik) | Permberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat) | Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes) | Keamanandan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan,serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat) |

## 3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumber Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehinggamemilikifokus sertasesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun dimasing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Sumber sebagai berikut :

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sumber

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN ) Mempercepat | 1. Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul | 1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan<br>2. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja<br>3. PemanfaatanTeknologi Informasi<br>4. Transparansi dan Pelibatan Publik<br>5. Penguatan Koordinasidan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten<br>6. Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik<br>7. Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi<br>8. Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting<br>9. Integrasidan Sinkronisasi Anggaran<br>10. PembangunanBerbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat<br>11. PengembanganSaluran PengaduanyangMudah diakses<br>12. Penjaminan Tindak Lanjut PengaduanyangCepatdan Transparan | |
| 2 | Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata (SAE INFRASTRUKTUR) | 2. Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfraktruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita penduduk | | |
| 3 | Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan (SAE EKONOMI) Peningkatan kemandirian Masyarakat Miskin | 3. Memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan usaha,pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta menciptakan lapangan pekerjaan dan memberantas kemiskinan dari masyarakat rentan dengan tujuan kemandirian masyarakat sipil | | |
| 4 | Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau (SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN) | 4. Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi masyarakat pedalaman untuk mewujudkan pedalaman ketentramandan | | |
| 5 | Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas (SAE SOSIAL) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ketertiban umum di wilayah | | |

**Sumber Data : RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo; Lampiran Perda Nomor 5 Tahun 2025 Bab III halaman III/59**

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Sumber ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secaraadil,merata,danberkualitas.Programinimencakup**berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan danpemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam memberdayakan kelompok – kelompok masyarakat desa dan kelurahan untuk wujudkan peningkatan pendidikan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang adil ,merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat pedesaan dan kelurahan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkuan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan sebagai sarana komunikasi serta menampung aspirasi dan permasalahan dimasyarakat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan danpemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada diantara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah

6. PenyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaandan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sumber merupakan **Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya**, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sumber juga merupakan proses strategis yang harus **terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah**. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sumber serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sumber dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sumber

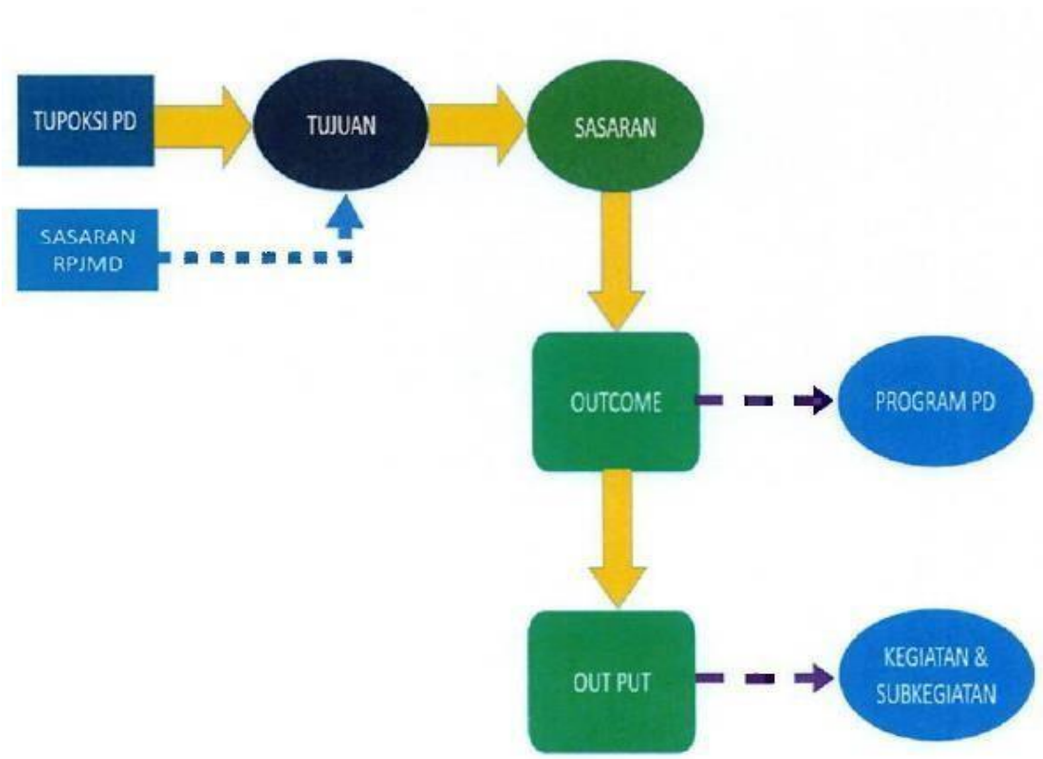

Tabel 4.2
Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sumber

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| **7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sumber** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas tata kelola perangkat daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | Prosentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Persentase penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik selama satu tahun | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepadla Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Perekonomian Masyarakat di Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terfaksana dengan Baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terfaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban di Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Tingkat Kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Terwujudnya Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap

Dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan **penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah**, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.811.165.706,94 | | 2.863.581.281,16 | | 2.906.320.652,22 | | 2.965.558.509,69 | | 3.035.097.600,5 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.762.165.706,94 | | 2.792.862.499,92 | | 2.834.485.118,21 | | 2.892.321.306,76 | | 2.960.143.065,93 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,76 | 74,22 | 2.762.165.706,94 | 74,96 | 2.792.862.499,92 | 75,71 | 2.834.485.118,21 | 76,47 | 2.892.321.306,76 | 77,24 | 2.960.143.065,93 | 7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sumber | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4.400.000 | | 4.840.000 | | 5.324.000 | | 5.856.400 | | 6.442.040 | | |
| Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 20 | 4.400.000 | 20 | 4.840.000 | 20 | 5.324.000 | 20 | 5.856.400 | 20 | 6.442.040 | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2.200.000 | | 2.420.000 | | 2.662.000 | | 2.928.200 | | 3.221.020 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 7 | 2.200.000 | 7 | 2.420.000 | 7 | 2.662.000 | 7 | 2.928.200 | 7 | 3.221.020 | | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2.200.000 | | 2.420.000 | | 2.662.000 | | 2.928.200 | | 3.221.020 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 20 | 2.200.000 | 20 | 2.420.000 | 20 | 2.662.000 | 20 | 2.928.200 | 20 | 3.221.020 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.514.405.461 | | 2.518.281.421 | | 2.526.360.832,68 | | 2.531.432.330,9 | | 2.532.393.791 | | |
| Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 48 | 2.514.405.461 | 48 | 2.518.281.421 | 48 | 2.526.360.832,68 | 48 | 2.531.432.330,9 | 48 | 2.532.393.791 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.475.645.861 | | 2.475.645.861 | | 2.479.461.716,68 | | 2.479.843.302,9 | | 2.475.645.861 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | 2.475.645.861 | | 2.475.645.861 | | 2.479.461.716,68 | | 2.479.843.302,9 | | 2.475.645.861 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 38.759.600 | | 42.635.560 | | 46.899.116 | | 51.589.028 | | 56.747.930 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 38.759.600 | 12 | 42.635.560 | 12 | 46.899.116 | 12 | 51.589.028 | 12 | 56.747.930 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 75.078.937,94 | | 84.631.640,92 | | 99.179.903,53 | | 131.050.155,86 | | 174.926.572,93 | | |
| Prosentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | 75.078.937,94 | 2 | 84.631.640,92 | 2 | 99.179.903,53 | 2 | 131.050.155,86 | 2 | 174.926.572,93 | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Paket Penalatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Paket Penalatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.500.200 | | 3.850.220 | | 4.235.242 | | 4.658.766 | | 5.124.643 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | 3.500.200 | 2 | 3.850.220 | 2 | 4.235.242 | 2 | 4.658.766 | 2 | 5.124.643 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Penalatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 31.581.754 | | 34.739.929 | | 38.213.922 | | 42.035.314 | | 46.238.846 | | |
| Tersedianya Penalatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Penalatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 2 | 31.581.754 | 2 | 34.739.929 | 2 | 38.213.922 | 2 | 42.035.314 | 2 | 46.238.846 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Penalatan Rumah Tangga | | | | 5.307.383,94 | | 7.882.931,92 | | 18.572.179,53 | | 42.381.659,86 | | 72.774.040,93 | | |
| Tersedianya Penalatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Penalatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 5.307.383,94 | 4 | 7.882.931,92 | 4 | 18.572.179,53 | 4 | 42.381.659,86 | 4 | 72.774.040,93 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 34.689.600 | | 38.158.560 | | 38.158.560 | | 41.974.416 | | 50.789.043 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 34.689.600 | 12 | 38.158.560 | 12 | 38.158.560 | 12 | 41.974.416 | 12 | 50.789.043 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 50.577.780 | | 55.635.558 | | 61.199.114 | | 67.319.025 | | 74.050.927 | | |
| Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 10 | 4 | 50.577.780 | 4 | 55.635.558 | 4 | 61.199.114 | 4 | 67.319.025 | 4 | 74.050.927 | | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 34.417.680 | | 37.859.448 | | 41.645.393 | | 45.809.932 | | 50.390.925 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 10 | 4 | 34.417.680 | 4 | 37.859.448 | 4 | 41.645.393 | 4 | 45.809.932 | 4 | 50.390.925 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 16.160.100 | | 17.776.110 | | 19.553.721 | | 21.509.093 | | 23.660.002 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 4 | 16.160.100 | 4 | 17.776.110 | 4 | 19.553.721 | 4 | 21.509.093 | 4 | 23.660.002 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 88.003.528 | | 96.803.880 | | 106.484.268 | | 117.132.695 | | 128.845.965 | | |
| Persentase penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 88.003.528 | 12 | 96.803.880 | 12 | 106.484.268 | 12 | 117.132.695 | 12 | 128.845.965 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 796.056 | | 875.661 | | 963.227 | | 1.059.550 | | 1.165.505 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 12 | 796.056 | 12 | 875.661 | 12 | 963.227 | 12 | 1.059.550 | 12 | 1.165.505 | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 28.200.810 | | 31.020.891 | | 34.122.980 | | 37.535.278 | | 41.288.806 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 28.200.810 | 12 | 31.020.891 | 12 | 34.122.980 | 12 | 37.535.278 | 12 | 41.288.806 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 59.006.662 | | 64.907.328 | | 71.398.061 | | 78.537.867 | | 86.391.654 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 59.006.662 | 12 | 64.907.328 | 12 | 71.398.061 | 12 | 78.537.867 | 12 | 86.391.654 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 29.700.000 | | 32.670.000 | | 35.937.000 | | 39.530.700 | | 43.483.770 | | |
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 0 | 29.700.000 | 0 | 32.670.000 | 0 | 35.937.000 | 0 | 39.530.700 | 0 | 43.483.770 | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 29.700.000 | | 32.670.000 | | 35.937.000 | | 39.530.700 | | 43.483.770 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12 | 12 | 29.700.000 | 12 | 32.670.000 | 12 | 35.937.000 | 12 | 39.530.700 | 12 | 43.483.770 | | |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 3.600.000 | | 3.640.007,9 | | 3.694.255,7 | | 3.769.635,04 | | 3.858.028,44 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.640.007,9 | 100 | 3.694.255,7 | 100 | 3.769.635,04 | 100 | 3.858.028,44 | 7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sumber | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1.800.000 | | 1.820.003,95 | | 1.847.127,85 | | 1.884.817,5 | | 1.929.014 | | |
| Terwujudnya Penyelengganaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik selama satu tahun | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 2 | 2 | 1.800.000 | 2 | 1.820.003,95 | 2 | 1.847.127,85 | 2 | 1.884.817,5 | 2 | 1.929.014 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 1.800.000 | | 1.820.003,95 | | 1.847.127,85 | | 1.884.817,5 | | 1.929.014 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 2 | 2 | 1.800.000 | 2 | 1.820.003,95 | 2 | 1.847.127,85 | 2 | 1.884.817,5 | 2 | 1.929.014 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 1.800.000 | | 1.820.003,95 | | 1.847.127,85 | | 1.884.817,54 | | 1.929.014,44 | | |
| Tercapainya realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak bahutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | 1.800.000 | 6 | 1.820.003,95 | 6 | 1.847.127,85 | 6 | 1.884.817,54 | 6 | 1.929.014,44 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1.800.000 | | 1.820.003,95 | | 1.847.127,85 | | 1.884.817,54 | | 1.929.014,44 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | 1.800.000 | 6 | 1.820.003,95 | 6 | 1.847.127,85 | 6 | 1.884.817,54 | 6 | 1.929.014,44 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 21.600.000 | | 21.840.047,41 | | 22.165.534 | | 22.617.810,39 | | 23.148.173,21 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 21.600.000 | 100 | 21.840.047,41 | 100 | 22.165.534 | 100 | 22.617.810,39 | 100 | 23.148.173,21 | 7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sumber | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 10.800.000 | | 11.380.036,41 | | 11.634.151 | | 10.000.000,79 | | 10.000.000,91 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Perekonomian Masyarakat di Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | | 3 | 10.800.000 | 3 | 11.380.036,41 | 3 | 11.624.151 | 3 | 10.000.000,79 | 3 | 10.000.000,91 | | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 5.400.000 | | 6.380.036,41 | | 6.624.151 | | 5.000.000,79 | | 5.000.000,91 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | 8 | 5.400.000 | 8 | 6.380.036,41 | 8 | 6.624.151 | 8 | 5.000.000,79 | 8 | 5.000.000,91 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 5.400.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | | 3 | 5.400.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 10.800.000 | | 10.460.011 | | 10.541.383 | | 12.617.809,6 | | 13.148.172,3 | | |
| Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | | 350 | 10.800.000 | 350 | 10.460.011 | 350 | 10.541.383 | 350 | 12.617.809,6 | 350 | 13.148.172,3 | | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 350 | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 5.400.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 6.963.357 | | 7.361.129 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 350 | 350 | 5.400.000 | 350 | 5.000.000 | 350 | 5.000.000 | 350 | 6.963.357 | 350 | 7.361.129 | | |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 5.400.000 | | 5.460.011 | | 5.541.383 | | 5.654.452,6 | | 5.787.043,3 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | | 350 | 5.400.000 | 350 | 5.460.011 | 350 | 5.541.383 | 350 | 5.654.452,6 | 350 | 5.787.043,3 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 23.800.000 | | 24.064.496,89 | | 24.423.134,95 | | 24.921.476,26 | | 25.505.857,52 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 23.800.000 | 100 | 24.064.496,89 | 100 | 24.423.134,95 | 100 | 24.921.476,26 | 100 | 25.505.857,52 | 7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sumber | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | 23.800.000 | | 24.064.496,89 | | 24.423.134,95 | | 24.921.476,26 | | 25.505.857,52 | | |
| Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 4 | 23.800.000 | 4 | 24.064.496,89 | 4 | 24.423.134,95 | 4 | 24.921.476,26 | 4 | 25.505.857,52 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 23.800.000 | | 24.064.496,89 | | 24.423.134,95 | | 24.921.476,26 | | 25.505.857,52 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 4 | 23.800.000 | 4 | 24.064.496,89 | 4 | 24.423.134,95 | 4 | 24.921.476,26 | 4 | 25.505.857,52 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 0 | | 18.140.889,38 | | 18.411.246,88 | | 18.786.918,76 | | 19.227.451,37 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.140.889,38 | 100 | 18.411.246,88 | 100 | 18.786.918,76 | 100 | 19.227.451,37 | 7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sumber | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 0 | | 18.140.889,38 | | 18.411.246,88 | | 18.786.918,76 | | 19.227.451,37 | | |
| Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Tingkat Kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.268 | 1.268 | 0 | 1.268 | 18.140.889,38 | 1.268 | 18.411.246,88 | 1.268 | 18.786.918,76 | 1.268 | 19.227.451,37 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 0 | | 18.140.889,38 | | 18.411.246,88 | | 18.786.918,76 | | 19.227.451,37 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1.268 | 1.268 | 0 | 1.268 | 18.140.889,38 | 1.268 | 18.411.246,88 | 1.268 | 18.786.918,76 | 1.268 | 19.227.451,37 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 0 | | 3.033.339,86 | | 3.141.362,48 | | 3.141.362,48 | | 3.215.024,03 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.033.339,86 | 100 | 3.141.362,48 | 100 | 3.141.362,48 | 100 | 3.215.024,03 | 7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sumber | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 0 | | 3.033.339,86 | | 3.141.362,48 | | 3.141.362,48 | | 3.215.024,03 | | |
| Terwujudnya Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.033.339,86 | 2 | 3.141.362,48 | 2 | 3.141.362,48 | 2 | 3.215.024,03 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 0 | | 1.516.669,9 | | 1.570.681,2 | | 1.570.681,2 | | 1.607.512 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.516.669,9 | 2 | 1.570.681,2 | 2 | 1.570.681,2 | 2 | 1.607.512 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 0 | | 1.516.669,96 | | 1.570.681,28 | | 1.570.681,28 | | 1.607.512,03 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.516.669,96 | 2 | 1.570.681,28 | 2 | 1.570.681,28 | 2 | 1.607.512,03 | | |

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah**.** Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/SUBKEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | MeningkatnyaKualitas Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| 3 | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan Umum di Wilayah Kecamatan | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| 4 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Tingkat Kecamatan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Ke | |
| 5 | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan | Terwujudnya Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang Bersih dan Baik | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumber sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumber

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sumber | | | | | | | | | |
| 2. | Indeks kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)** adalah **ukuran keberhasilan yang bersifat operasional** dan digunakan untuk menilai capaian **kinerja kegiatan atau sub kegiatan** dalam rangka mendukung pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** perangkat daerah. **Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Sumber sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :**

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | 7.01 - KECAMATAN | | | | | | | | | | |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | positif | Indeks | 80,48 | 81,28 | 82,09 | 82,89 | 8.370 | 84,5 | 85,31 | |

# BAB V

# PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Sumber.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Sumber.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 23 September 2025

**Camat Sumber**

**NUR RACHMAD SHOLEH, S.STP.,M.Si**
Pembina
NIP. 19861015 200412 1 002

# RENCANA STRATEGIS

# ( RENSTRA )

# KECAMATAN SUMBERASIH

# TAHUN 2025-2029

**KECAMATAN SUMBERASIH**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberasih Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Sumberasih Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Sumberasih. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Sumberasih. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Sumberasih dengan Kecamatan dan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

Sumberasih, 22 September 2025

CAMAT SUMBERASIH
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN SUMBERASIH

**AGUS SETIJONO, S.Sos**
Pembina Tk I
NIP. 19680814 198809 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 6
1.4 Sistematika Penulisan ..... 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumberasih ..... 10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Sumberasih ..... 17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberasih ..... 21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 27
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Sumberasih ..... 27
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Sumberasih ..... 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sumberasih Tahun 2025-2029 ..... 32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sumberasih dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 40
4.1 Uraian Program ..... 40
4.2 Uraian Kegiatan ..... 44
BAB V PENUTUP ..... 79
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 79
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 80

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..…….…..… 18
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ……..…… 19
Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..…….. 19
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ……. 22
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo (2020-2024) …… 23
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Sumberasih ……..…30
Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 …….. 35
Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Sumberasih …… 36
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Sumberasih ……...38
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Sumberasih ……..……33
Tabel 4.1 Program Kecamatan Sumberasih ……42
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sumberasih ……45
Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Sumberasih …….. 58
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sumberasih ……61
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… 77
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberasih ……..78
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sumberasih ……78

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sumberasih ……..……..…17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo ..…. 33
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah …… 34
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sumberasih ……..45

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Sumberasih menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumberasih setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Sumberasih juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Sumberasih. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Sumberasih berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Sumberasih terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberasih yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Sumberasih untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Sumberasih berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Sumberasih dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Sumberasih disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Sumberasih akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Sumberasih dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Sumberasih untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Sumberasih berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan

Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta Pembangunan wilayah melalui Perencanaan yang sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUMBERASIH**

Bab II memuat :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumberasih

2.2 Sumber Daya Kecamatan Sumberasih

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberasih

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Sumberasih

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sumberasih

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sumberasih Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sumberasih dalam Mencapai

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumberasih 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumberasih; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumberasih

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Sumberasih Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
   b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;

c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;

b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Sumberasih**

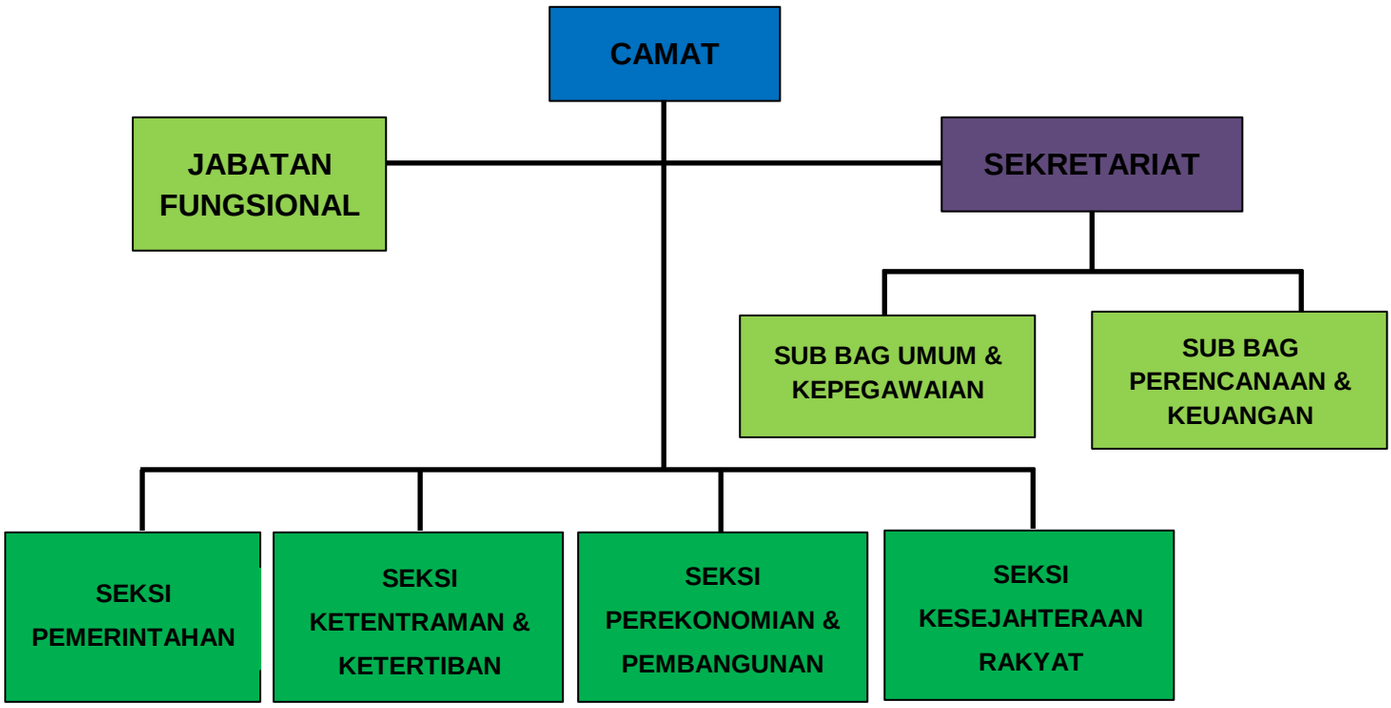


Struktur Organisasi Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sumberasih

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional

dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Sumberasih.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Sumberasih sebanyak 15 orang dengan rincian : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 15 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 1 orang yang terdiri perempuan sebanyak 2 orang. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 10 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Sumberasih berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | **0** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | **3** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 10. | Honorer | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | **10** |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **9** | **0** | **12** | **1** | **10** | **4** | **25** |

***Sumber Data : Kecamatan Sumberasih***

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan**

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | **19** | 1 | 4 | 10 | 4 | **19** |
| 2. | Perempuan | - | 1 | - | - | 2 | 3 | **4** | - | - | 3 | 1 | **4** |
| **Jumlah** | | **-** | **7** | **7** | **1** | **3** | **10** | **23** | **1** | **4** | **13** | **5** | **23** |

***Sumber Data : Kecamatan Sumberasih***

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.3**

**Jumlah Sarana Prasarana**

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak Berat (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendaraan Dinas Roda 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | Portable Generating Set | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Pompa Air | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Gerobak Dorong | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Lemari Kayu | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Rak Besi | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Filing Cabinet Besi | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Brandkas | 2 | 1 | 1 |
| 10 | CCTV | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Papan Visual/ Papan Nama | 7 | 5 | 2 |
| 12 | Alat Penghancur Kertas | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Mesin Absensi | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Focusing Screen/Layar LCD Projektor | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Meja Kerja Kayu | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Kursi Besi/Metal | 11 | 11 | 0 |
| 17 | Kursi Kayu | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Meja Rapat | 4 | 4 | 0 |
| 19 | Meja Podium | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Meja Resepsionis | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Meja 1/2 Biro | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Kursi Rapat | 20 | 20 | 0 |
| 23 | Kursi Tamu | 5 | 5 | 0 |
| 24 | Kursi Lipat | 18 | 18 | 0 |
| 25 | Sofa | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Lemari Es | 1 | 1 | 0 |
| 27 | AC. Window | 6 | 4 | 2 |
| 28 | AC. Split | 7 | 5 | 2 |
| 29 | Kipas Angin | 14 | 2 | 12 |
| 30 | Televisi | 3 | 2 | 1 |
| 31 | Sound System | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Wireless | 3 | 2 | 1 |
| 33 | Camera Video | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Tangga Alumunium | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Dispenser | 2 | 2 | 0 |
| 36 | Meja Tamu Biasa | 4 | 4 | 0 |
| 37 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Kursi Kerja | 8 | 8 | 0 |
| 39 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf | 3 | 3 | 0 |
| 40 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 5 | 5 | 0 |
| 41 | Audio Amplifier | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Alat Komunikasi Sosial Lain-Lain | 6 | 3 | 3 |
| 43 | Pc. Unit | 9 | 0 | 9 |
| 44 | Laptop | 10 | 8 | 2 |
| 45 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Printer | 14 | 4 | 10 |
| 47 | Hard Disk Eksternal | 2 | 1 | 1 |

***Sumber Data : Kecamatan Sumberasih***

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberasih

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumberasih yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Sumberasih telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Sumberasih dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan

ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

Target dan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 97,70 | 88,12 | 86,93 | - | - | 97,70 | 85,30 | 97,49 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 96,10 | 100 | 99,00 | - | - | 96,10 | 100,00 | 96,16 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 92,70 | 100 | 97,00 | - | - | 92,70 | 100,00 | 97,08 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - | 95,71 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 | | | 69,71 | 69,86 | 70,46 | - | - | 87,14 | 87,33 | 95,22 |

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | **3.080.243.240,00** | **3.177.425.114,00** | **3.392.472.916,00** | **-** | **-** | **2.838.938.482,00** | **2.980.696.880,00** | **2.952.244.493,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **92,17** | **93,81** | **87,02** | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 17.140.000,00 | 7.000.000,00 | 12.480.000,00 | - | - | 10.060.000,00 | - | 11.415.200,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 58,69 | - | 91,47 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 9.940.000,00 | 1.400.000,00 | 2.720.000,00 | | | 5.260.000,00 | - | 2.660.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 52,92 | 0,00 | 97,79 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 2.720.000,00 | | | 1.200.000,00 | - | 2.660.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 0,00 | 97,79 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 2.720.000,00 | | | 1.200.000,00 | - | 5.145.200,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 0,00 | 189,16 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 | | | 1.200.000,00 | - | 950.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 0,00 | 59,38 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 2.720.000,00 | | | 1.200.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | 1.200.000,00 | - | - | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.200.000,00 | - | - | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.507.126.000,0 | 2.623.289.990,0 | 2.790.045.297,0 | - | - | 2.325.808.218,0 | 2.507.655.799,0 | 2.468.669.344,0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92,77 | 95,59 | 88,48 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | 2.479.991.000,00 | 2.599.159.490,00 | 2.748.845.897,00 | - | - | 2.306.905.401,00 | 2.505.540.799,00 | 2.449.562.844,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,02 | 96,40 | 89,11 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | 18.735.000,00 | 22.130.500,00 | 39.499.400,00 | - | - | 17.702.817,00 | 2.115.000,00 | 18.156.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 94,49 | 9,56 | 45,97 | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | 1.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | 1.200.000,00 | 2.000.000,00 | 1.700.000,00 | - | - | - | - | 950.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 55,88 | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | - | 1.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | 3.600.000,00 | - | - | - | - | 1.200.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 33,33 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | 1.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 48.535.080,00 | 43.997.050,00 | 66.461.971,00 | - | - | 35.385.926,00 | 28.448.656,00 | 58.466.424,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 72,91 | 64,66 | 87,97 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | 2.535.400,00 | 2.954.300,00 | 2.465.000,00 | - | - | 783.000,00 | - | 2.465.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 30,88 | 0,00 | 100,00 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 13.534.100,00 | 10.299.800,00 | 21.598.000,00 | - | - | 5.923.000,00 | 3.282.800,00 | 21.499.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 43,76 | 31,87 | 99,54 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | 3.581.200,00 | 3.950.900,00 | 9.950.600,00 | - | - | 2.569.250,00 | 2.262.840,00 | 9.771.702,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 71,74 | 57,27 | 98,20 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 21.280.000,00 | - | - | 19.987.176,00 | 19.999.016,00 | 20.625.722,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,94 | 100,00 | 96,93 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | - | 3.724.380,00 | 3.718.850,00 | 8.018.371,00 | - | - | 1.848.500,00 | 1.104.000,00 | 1.705.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 49,63 | 29,69 | 21,26 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | 5.160.000,00 | 3.073.200,00 | 3.150.000,00 | - | - | 4.275.000,00 | 1.800.000,00 | 2.400.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 82,85 | 58,57 | 76,19 | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 37.223.000,00 | 24.388.000,00 | 67.326.000,00 | - | - | 36.210.375,00 | 24.388.000,00 | 35.078.000,00 | | | | | | | |
| Pengadaan Mebel | | | | - | 33.926.000,00 | | | | - | 7.408.000,00 | | | | | | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 37.223.000,00 | 24.388.000,00 | 33.400.000,00 | | | 36.210.375,00 | 24.388.000,00 | 27.670.000,00 | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 428.019.160,00 | 459.070.074,00 | 387.189.648,00 | - | - | 405.821.463,00 | 407.016.125,00 | 316.804.725,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 94,81 | 88,66 | 81,82 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.100.000,00 | - | - | 300.000,00 | 200.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 33,33 | 0,00 | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | 37.869.600,00 | 27.995.950,00 | 36.988.600,00 | | - | 23.397.071,00 | 21.821.303,00 | 30.816.121,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 61,78 | 77,94 | 83,31 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 25.000.000,00 | - | - | | - | 24.000.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 96,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | 364.849.560,00 | 430.474.124,00 | 349.101.048,00 | | - | 358.124.392,00 | 384.994.822,00 | 285.988.604,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,16 | 89,44 | 81,92 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 42.200.000,00 | 19.680.000,00 | 68.970.000,00 | - | - | 25.652.500,00 | 13.188.300,00 | 61.810.800,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 60,79 | 67,01 | 89,62 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | 2.400.000,00 | 4.800.000,00 | 26.200.000,00 | | - | 1.997.500,00 | 1.913.300,00 | 21.119.300,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 83,23 | 39,86 | 80,61 | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 29.940.000,00 | 5.360.000,00 | 8.770.000,00 | | | 13.795.000,00 | 1.770.000,00 | 6.691.500,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | 9.860.000,00 | 9.520.000,00 | 34.000.000,00 | | - | 9.860.000,00 | 9.505.000,00 | 34.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 99,84 | 100,00 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | **86.942.200,00** | **37.388.800,00** | **46.050.000,00** | **-** | **-** | **48.715.500,00** | **6.560.000,00** | **28.945.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **56,03** | **17,55** | **62,86** | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 70.697.000,00 | 31.004.800,00 | 23.175.000,00 | - | - | 42.040.000,00 | 4.720.000,00 | 13.870.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 59,47 | 15,22 | 59,85 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | - | 40.697.000,00 | 24.404.800,00 | 15.275.000,00 | - | - | 30.040.000,00 | 3.820.000,00 | 10.450.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 73,81 | 15,65 | 68,41 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 30.000.000,00 | 6.600.000,00 | 7.900.000,00 | - | - | 12.000.000,00 | 900.000,00 | 3.420.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 40,00 | 13,64 | 43,29 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 16.245.200,00 | 6.384.000,00 | 22.875.000,00 | - | - | 6.675.500,00 | 1.840.000,00 | 15.075.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 41,09 | 28,82 | 65,90 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Nonusaha | - | - | 16.245.200,00 | 6.384.000,00 | 22.875.000,00 | - | - | 6.675.500,00 | 1.840.000,00 | 15.075.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 41,09 | 28,82 | 65,90 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | - | - | - | | - | - | - | - | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | **178.102.800,00** | **367.965.200,00** | **35.515.000,00** | **-** | **-** | **164.482.500,00** | **324.892.400,00** | **26.997.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **92,35** | **88,29** | **76,02** | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 178.102.800,00 | 317.965.200,00 | 18.715.000,00 | - | - | 164.482.500,00 | 291.414.400,00 | 15.825.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92,35 | 91,65 | 84,56 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | 6.000.000,00 | 16.256.000,00 | 9.190.000,00 | - | - | 6.000.000,00 | 11.770.000,00 | 7.315.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 72,40 | 79,60 | | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | - | 172.102.800,00 | 292.650.000,00 | 9.525.000,00 | - | - | 158.482.500,00 | 279.644.400,00 | 8.510.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92,09 | 95,56 | 89,34 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 9.059.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 33.478.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 66,96 | #DIV/0! | | |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 33.478.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 66,96 | #DIV/0! | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | 16.800.000,00 | - | - | - | - | 11.172.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 66,50 | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | - | 9.600.000,00 | - | - | - | - | 7.980.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 83,13 | | |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 7.200.000,00 | | | | - | 3.192.000,00 | | | | | | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | **69.414.400,00** | **75.229.800,00** | **69.120.000,00** | **-** | **-** | **58.218.500,00** | **36.672.000,00** | **54.040.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **83,87** | **48,75** | **78,18** | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan | - | - | 69.414.400,00 | 75.229.800,00 | 57.945.000,00 | - | - | 58.218.500,00 | 36.672.000,00 | 54.040.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 83,87 | 48,75 | 93,26 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | 52.635.000,00 | 52.476.600,00 | 57.945.000,00 | - | - | 47.343.500,00 | 29.357.000,00 | 54.040.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 89,95 | 55,94 | 93,26 | | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | 16.779.400,00 | 22.753.200,00 | - | - | - | 10.875.000,00 | 7.315.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 64,81 | 32,15 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan | - | - | - | - | 11.175.000,00 | | | - | - | - | | | | | | | |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | - | 11.175.000,00 | | | | | - | | | | | | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | **52.474.100,00** | **35.776.600,00** | **68.950.000,00** | **-** | **-** | **26.314.000,00** | **29.513.800,00** | **32.370.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **50,15** | **82,49** | **46,95** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 52.474.100,00 | 35.776.600,00 | 68.950.000,00 | - | - | 26.314.000,00 | 29.513.800,00 | 32.370.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50,15 | 82,49 | 46,95 | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | - | 52.474.100,00 | 35.776.600,00 | 55.850.000,00 | - | - | 26.314.000,00 | 29.513.800,00 | 25.910.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50,15 | 82,49 | 46,39 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | - | 13.100.000,00 | | | | - | 6.460.000,00 | | | | | | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | - | - | - | 7.600.000,00 | - | - | - | - | 1.520.000,00 | | | | | | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | - | - | 7.600.000,00 | - | - | - | - | 1.520.000,00 | | | | | | | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | - | 4.800.000,00 | | | | | 1.520.000,00 | | | | | | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | - | 2.800.000,00 | | | | | - | | | | | | | |
| **Jumlah** | **-** | **-** | **3.467.176.740,00** | **3.693.785.514,00** | **3.619.707.916,00** | **-** | **-** | **3.136.668.982,00** | **3.378.335.080,00** | **3.096.116.493,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **90,47** | **91,46** | **85,53** | | |

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah Kecamatan Sumberasih :

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sumberasih

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan :

- **Keterbatasan Sumber Daya** : Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur** : Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.
- **Birokrasi yang Kaku** : Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.

- **Akses dan Kesenjangan Digital** : Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah** : Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital** : Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar-Sektor** : Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur** : Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu** : Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat** : Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sumberasih

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Sumberasih adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

**Tabel 2.6**

**Isu Strategis Kecamatan Sumberasih**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti kawasan pesisir | Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br><br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br><br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |
| Potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, serta kehutanan | Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program- | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | |
| | Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

***Sumber Data : Kecamatan Sumberasih***

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sumberasih Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Sumberasih Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumberasih, dalam hal ini Kecamatan Sumberasih diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui

pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Sumberasih Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

**Gambar 3.1**

**Konsep Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo**

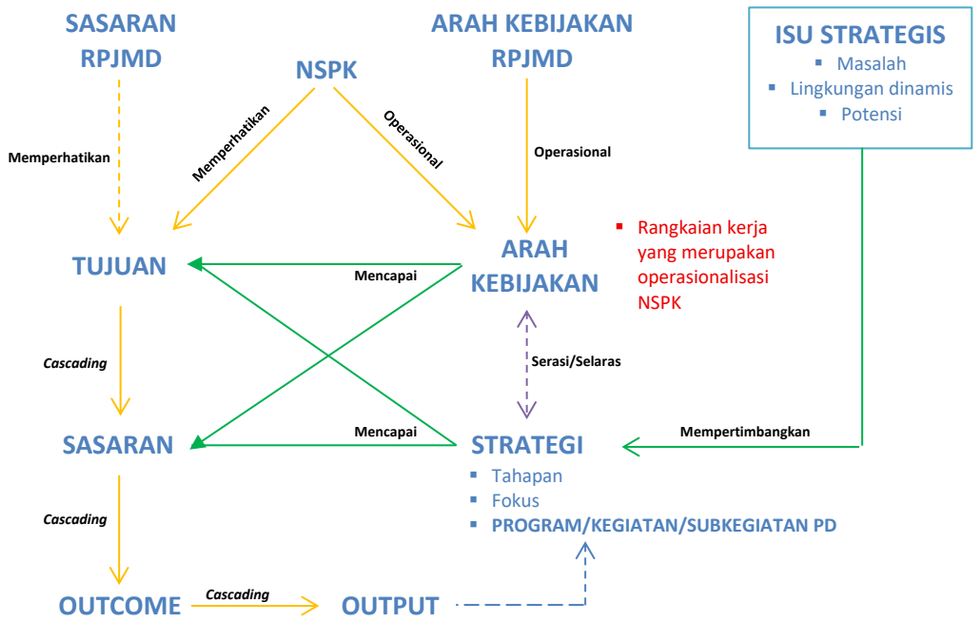


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan

Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.2**

**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**

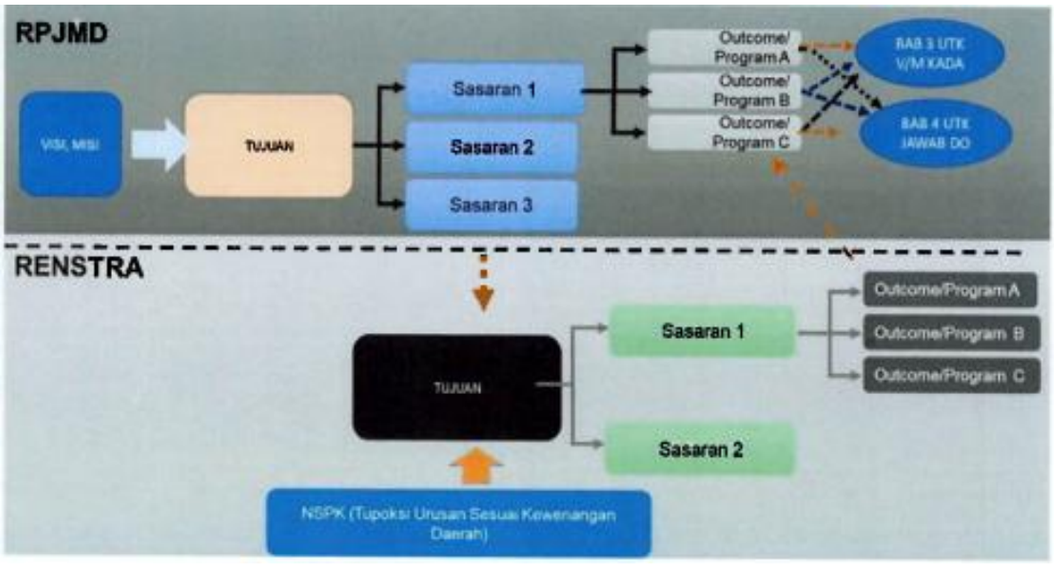


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.1**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sumberasih**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Sumberasih** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 86,93 | 87,8 | 88,684 | 89,56 | 90,46 | 91,36 | 92,28 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, diperlukan Misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberasih

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

**Tabel 3.1.2**

**Definisi Operasional IKU Kecamatan Sumberasih**

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut :<br>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | |
| 3. | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai hasil atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1)<br>———————————— X 100<br>Nilai LHE AKIP tahun (n-1)<br><br>Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Sumberasih***

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sumberasih dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Sumberasih dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis

data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

## B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Sumberasih

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Sumberasih dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Kecamatan Sumberasih**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

***Sumber Data : Kecamatan Sumberasih***

## C. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Sumberasih

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Sumberasih sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Sumberasih :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Sumberasih dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Sumberasih, sebagai berikut

**Tabel 3.3**

**Arah Kebijakan Kecamatan Sumberasih**

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul; | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

***Sumber Data : Kecamatan Sumberasih***

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahun, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman,

ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

## Tabel 4.1

## Program Kecamatan Sumberasih

| IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.743.917.972,54 | | 2.774.411.972,84 | | 2.815.759.619,34 | | 2.873.213.723,62 | | 2.940.587.430,9 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.534.905.972,54 | | 2.563.077.158,53 | | 2.601.275.237,75 | | 2.654.352.900,28 | | 2.716.594.561,49 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 70,46 | 70,5 | 70,53 | 2.534.905.972,54 | 70,57 | 2.563.077.158,53 | 70,6 | 2.601.275.237,75 | 70,64 | 2.654.352.900,28 | 70,67 | 2.716.594.561,49 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 30.000.000 | | 30.333.399,18 | | 30.785.464,23 | | 31.413.625,54 | | 32.150.240,57 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.333.399,18 | 100 | 30.785.464,23 | 100 | 31.413.625,54 | 100 | 32.150.240,57 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 65.200.000 | | 65.924.587,56 | | 66.907.075,58 | | 68.272.279,51 | | 69.873.189,51 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 65.200.000 | 100 | 65.924.587,56 | 100 | 66.907.075,58 | 100 | 68.272.279,51 | 100 | 69.873.189,51 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 72.212.000 | | 73.014.514,06 | | 74.102.664,75 | | 75.614.690,92 | | 77.387.772,41 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang | 100 | 100 | 100 | 72.212.000 | 100 | 73.014.514,06 | 100 | 74.102.664,75 | 100 | 75.614.690,92 | 100 | 77.387.772,41 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terlaksana (%) | | | | | | | | | | | | | Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 35.600.000 | | 35.995.633,69 | | 36.532.084,21 | | 37.277.502,31 | | 38.151.618,81 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 35.600.000 | 100 | 35.995.633,69 | 100 | 36.532.084,21 | 100 | 37.277.502,31 | 100 | 38.151.618,81 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 6.000.000 | | 6.066.679,82 | | 6.157.092,82 | | 6.282.725,06 | | 6.430.048,11 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 6.000.000 | 100 | 6.066.679,82 | 100 | 6.157.092,82 | 100 | 6.282.725,06 | 100 | 6.430.048,11 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2.743.917.972,54 | | 2.774.411.972,84 | | 2.815.759.619,34 | | 2.873.213.723,62 | | 2.940.587.430,90 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 4.1**

**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan**

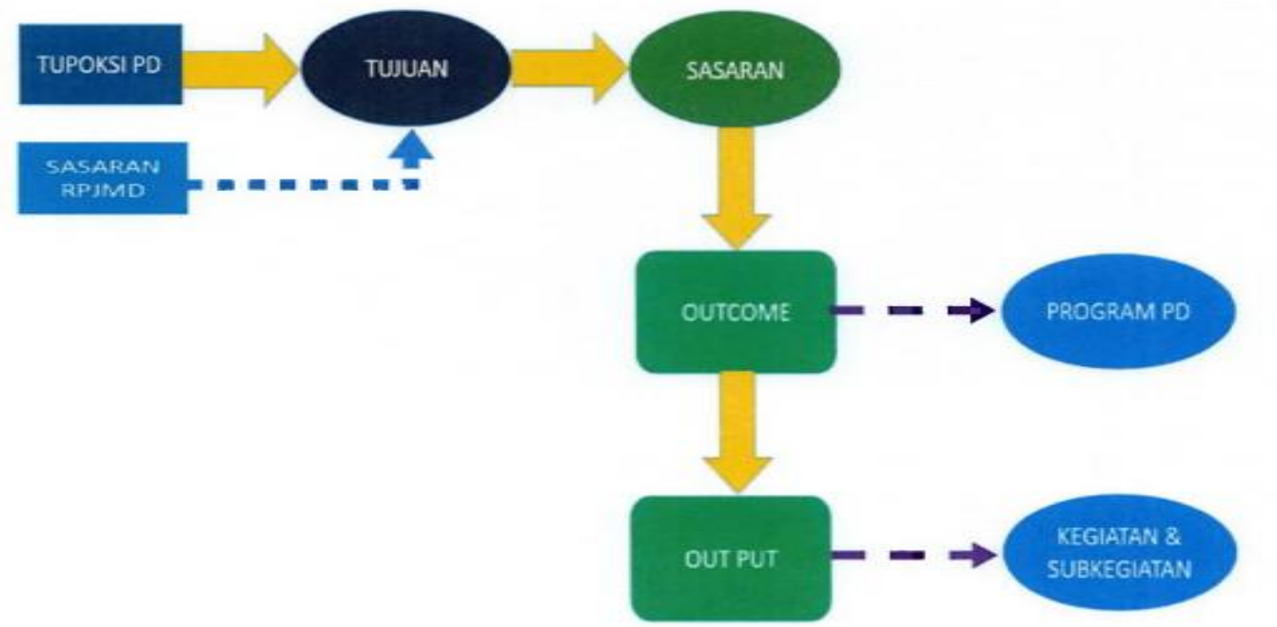

**Tabel 4.2**

**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecamatan Sumberasih**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKBGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| **7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sumberasih** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Tercapainya laporan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | terhutang (SPPT) | | Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga baik secara kesehatan, sosial, dan lingkungan di tingkat pedesaan/kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan | 7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hidup (Keluarga) | Hidup | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tercapainya kegiatan falitasi peringatan hari - hari besar keagamaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | efisien, dan akuntabel | | | | |
| | | | | Terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2.1**

**Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Sumberasih**

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| | | | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Sumberasih***

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut :

## Tabel 4.3

## Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sumberasih

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | *BASELINE* | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | 2024 | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.743.917.972,54 | | 2.774.411.972,84 | | 2.815.759.619,34 | | 2.873.213.723,62 | | 2.940.587.430,9 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.534.905.972,54 | | 2.563.077.158,53 | | 2.601.275.237,75 | | 2.654.352.900,28 | | 2.716.594.561,49 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 70,46 | 70,53 | 2.534.905.972,54 | 70,57 | 2.563.077.158,53 | 70,6 | 2.601.275.237,75 | 70,64 | 2.654.352.900,28 | 70,67 | 2.716.594.561,49 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sumberasih | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3.000.000 | | 3.033.300 | | 3.078.496,17 | | 3.141.297,48 | | 3.214.803,84 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 20 | 3.000.000 | 20 | 3.033.300 | 20 | 3.078.496,17 | 20 | 3.141.297,48 | 20 | 3.214.803,84 |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1.000.000 | | 1.011.100 | | 1.026.165,39 | | 1.047.099,16 | | 1.071.601,28 |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 7 | 1.000.000 | 7 | 1.011.100 | 7 | 1.026.165,39 | 7 | 1.047.099,16 | 7 | 1.071.601,28 |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1.000.000 | | 1.011.100 | | 1.026.165,39 | | 1.047.099,16 | | 1.071.601,28 |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | 2 | 8 | 1.000.000 | 8 | 1.011.100 | 8 | 1.026.165,39 | 8 | 1.047.099,16 | 8 | 1.071.601,28 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.000.000 | | 1.011.100 | | 1.026.165,39 | | 1.047.099,16 | | 1.071.601,28 | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 20 | 1.000.000 | 20 | 1.011.100 | 20 | 1.026.165,39 | 20 | 1.047.099,16 | 20 | 1.071.601,28 | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.261.965.184,54 | | 2.287.109.508,92 | | 2.321.196.348,71 | | 2.368.561.362,3 | | 2.424.126.204,26 | |
| Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 2.261.965.184,54 | 12 | 2.287.109.508,92 | 12 | 2.321.196.348,71 | 12 | 2.368.561.362,3 | 12 | 2.424.126.204,26 | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ | 12 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.255.253.184,54 | | 2.280.323.005,72 | | 2.314.308.726,61 | | 2.361.533.232,71 | | 2.416.933.616,44 | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 14 | 2.255.253.184,54 | 14 | 2.280.323.005,72 | 14 | 2.314.308.726,61 | 14 | 2.361.533.232,71 | 14 | 2.416.933.616,44 | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 6.712.000 | | 6.786.503,2 | | 6.887.622,1 | | 7.028.129,59 | | 7.192.587,82 | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 6.712.000 | 12 | 6.786.503,2 | 12 | 6.887.622,1 | 12 | 7.028.129,59 | 12 | 7.192.587,82 | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
| 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 37.352.900 | | 37.767.517,19 | | 38.330.253,2 | | 39.112.190,37 | | 40.027.415,62 | |
| Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 37.352.900 | 2 | 37.767.517,19 | 4 | 38.330.253,2 | 4 | 39.112.190,37 | 4 | 40.027.415,62 | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang | 12 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.361.600 | | 3.398.913,76 | | 3.449.557,58 | | 3.519.928,55 | | 3.602.294,88 |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | 3.361.600 | 2 | 3.398.913,76 | 2 | 3.449.557,58 | 2 | 3.519.928,55 | 2 | 3.602.294,88 |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 1.835.300 | | 1.855.671,83 | | 1.883.321,34 | | 1.921.741,1 | | 1.966.709,84 |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 1.835.300 | 4 | 1.855.671,83 | 4 | 1.883.321,34 | 4 | 1.921.741,1 | 4 | 1.966.709,84 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.940.000 | | 24.205.734 | | 24.566.399,44 | | 25.067.553,99 | | 25.654.134,75 | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 23.940.000 | 12 | 24.205.734 | 12 | 24.566.399,44 | 12 | 25.067.553,99 | 12 | 25.654.134,75 | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.216.000 | | 8.307.197,6 | | 8.430.974,84 | | 8.602.966,73 | | 8.804.276,15 | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 8.216.000 | 4 | 8.307.197,6 | 4 | 8.430.974,84 | 4 | 8.602.966,73 | 4 | 8.804.276,15 | |
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | 2 | 0 | | 0 | 3 | 0 | | 0 | 4 | 0 | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | 2 | 0 | | 0 | 3 | 0 | | 0 | 4 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 203.287.888 | | 205.544.383,56 | | 208.606.994,87 | | 212.862.577,58 | | 217.843.561,89 | |
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 203.287.888 | 12 | 205.544.383,56 | 12 | 208.606.994,87 | 12 | 212.862.577,58 | 12 | 217.843.561,89 | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.548.100 | | 4.598.583,91 | | 4.667.102,81 | | 4.762.311,71 | | 4.873.749,8 | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 4.548.100 | 12 | 4.598.583,91 | 12 | 4.667.102,81 | 12 | 4.762.311,71 | 12 | 4.873.749,8 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menyurat | (Laporan) | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 22.000.000 | | 22.244.200 | | 22.575.638,58 | | 23.036.181,61 | | 23.575.228,26 |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 22.000.000 | 12 | 22.244.200 | 12 | 22.575.638,58 | 12 | 23.036.181,61 | 12 | 23.575.228,26 |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.575.000 | | 2.603.582,5 | | 2.642.375,88 | | 2.696.280,35 | | 2.759.373,31 |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 2.575.000 | 12 | 2.603.582,5 | 12 | 2.642.375,88 | 12 | 2.696.280,35 | 12 | 2.759.373,31 |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 174.164.788 | | 176.098.017,15 | | 178.721.877,6 | | 182.367.803,91 | | 186.635.210,52 |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 174.164.788 | 12 | 176.098.017,15 | 12 | 178.721.877,6 | 12 | 182.367.803,91 | 12 | 186.635.210,52 |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 29.300.000 | | 29.622.448,86 | | 30.063.144,8 | | 30.675.472,55 | | 31.382.575,88 |
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang | 12 | 12 | 29.300.000 | 12 | 29.622.448,86 | 12 | 30.063.144,8 | 12 | 30.675.472,55 | 12 | 31.382.575,88 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kondisi baik | Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 12 | | 12 | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 22.800.000 | | 23.053.080 | | 23.396.570,89 | | 23.873.860,94 | | 24.432.509,28 |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12 | 12 | 22.800.000 | 12 | 23.053.080 | 12 | 23.396.570,89 | 12 | 23.873.860,94 | 12 | 24.432.509,28 |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 6.500.000 | | 6.569.368,86 | | 6.666.573,91 | | 6.801.611,61 | | 6.950.066,6 |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 6.500.000 | 2 | 6.569.368,86 | 2 | 6.666.573,91 | 12 | 6.801.611,61 | 12 | 6.950.066,6 |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 30.000.000 | | 30.333.399,18 | | 30.785.464,23 | | 31.413.625,54 | | 32.150.240,57 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.333.399,18 | 100 | 30.785.464,23 | 100 | 31.413.625,54 | 100 | 32.150.240,57 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sumberasih | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 20.000.000 | | 20.222.399,18 | | 20.523.810,33 | | 20.942.633,9 | | 21.434.227,73 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 10 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.222.399,18 | 3 | 20.523.810,33 | 3 | 20.942.633,9 | 3 | 21.434.227,73 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 20.000.000 | | 20.222.399,18 | | 20.523.810,33 | | 20.942.633,9 | | 21.434.227,73 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 10 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.222.399,18 | 3 | 20.523.810,33 | 3 | 20.942.633,9 | 3 | 21.434.227,73 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 10.000.000 | | 10.111.000 | | 10.261.653,9 | | 10.470.991,64 | | 10.716.012,84 | | |
| Tercapainya laporan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 2 | 6 | 10.000.000 | 6 | 10.111.000 | 6 | 10.261.653,9 | 6 | 10.470.991,64 | 6 | 10.716.012,84 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 10.000.000 | | 10.111.000 | | 10.261.653,9 | | 10.470.991,64 | | 10.716.012,84 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 2 | 6 | 10.000.000 | 6 | 10.111.000 | 6 | 10.261.653,9 | 6 | 10.470.991,64 | 6 | 10.716.012,84 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 65.200.000 | | 65.924.587,56 | | 66.907.075,58 | | 68.272.279,51 | | 69.873.189,51 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 65.200.000 | 100 | 65.924.587,56 | 100 | 66.907.075,58 | 100 | 68.272.279,51 | 100 | 69.873.189,51 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sumber | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | asih | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 61.200.000 | | 61.880.187,56 | | 62.802.414,02 | | 64.083.882,85 | | 65.586.784,37 | | |
| Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 13 | 13 | 61.200.000 | 13 | 61.880.187,56 | 13 | 62.802.414,02 | 13 | 64.083.882,85 | 13 | 65.586.784,37 | | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 12 | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 7.200.000 | | 7.280.787,56 | | 7.389.482,96 | | 7.540.528 | | 7.720.315,01 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 12 | 26 | 7.200.000 | 26 | 7.280.787,56 | 26 | 7.389.482,96 | 26 | 7.540.528 | 26 | 7.720.315,01 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 54.000.000 | | 54.599.400 | | 55.412.931,06 | | 56.543.354,85 | | 57.866.469,36 | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 13 | 13 | 54.000.000 | 13 | 54.599.400 | 13 | 55.412.931,06 | 13 | 56.543.354,85 | 13 | 57.866.469,36 | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 4.000.000 | | 4.044.400 | | 4.104.661,56 | | 4.188.396,66 | | 4.286.405,14 | |
| Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga baik secara kesehatan, sosial, dan lingkungan di tingkat pedesaan/kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga) | 2 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.044.400 | 4 | 4.104.661,56 | 4 | 4.188.396,66 | 4 | 4.286.405,14 | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 2 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 2.000.000 | | 2.022.200 | | 2.052.330,78 | | 2.094.198,33 | | 2.143.202,57 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 2 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.022.200 | 4 | 2.052.330,78 | 4 | 2.094.198,33 | 4 | 2.143.202,57 | | |
| 7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | | | | 2.000.000 | | 2.022.200 | | 2.052.330,78 | | 2.094.198,33 | | 2.143.202,57 | | |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga) | 2 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.022.200 | 4 | 2.052.330,78 | 4 | 2.094.198,33 | 4 | 2.143.202,57 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 72.212.000 | | 73.014.514,06 | | 74.102.664,75 | | 75.614.690,92 | | 77.387.772,41 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 72.212.000 | 100 | 73.014.514,06 | 100 | 74.102.664,75 | 100 | 75.614.690,92 | 100 | 77.387.772,41 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sumberasih | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 72.212.000 | | 73.014.514,06 | | 74.102.664,75 | | 75.614.690,92 | | 77.387.772,41 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah | 4 | 14 | 72.212.000 | 14 | 73.014.514,06 | 14 | 74.102.664,75 | 14 | 75.614.690,92 | 14 | 77.387.772,41 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 72.212.000 | | 73.014.514,06 | | 74.102.664,75 | | 75.614.690,92 | | 77.387.772,41 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | 72.212.000 | 14 | 73.014.514,06 | 14 | 74.102.664,75 | 14 | 75.614.690,92 | 14 | 77.387.772,41 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 35.600.000 | | 35.995.633,69 | | 36.532.084,21 | | 37.277.502,31 | | 38.151.618,81 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 35.600.000 | 100 | 35.995.633,69 | 100 | 36.532.084,21 | 100 | 37.277.502,31 | 100 | 38.151.618,81 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sumberasih | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 35.600.000 | | 35.995.633,69 | | 36.532.084,21 | | 37.277.502,31 | | 38.151.618,81 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercapainya kegiatan falitasi peringatan hari - hari besar keagamaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 6 | 1.605 | 35.600.000 | 1.605 | 35.995.633,69 | 1.605 | 36.532.084,21 | 1.605 | 37.277.502,31 | 1.605 | 38.151.618,81 | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 35.600.000 | | 35.995.633,69 | | 36.532.084,21 | | 37.277.502,31 | | 38.151.618,81 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 6 | 1.605 | 35.600.000 | 1.605 | 35.995.633,69 | 1.605 | 36.532.084,21 | 1.605 | 37.277.502,31 | 1.605 | 38.151.618,81 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 6.000.000 | | 6.066.679,82 | | 6.157.092,82 | | 6.282.725,06 | | 6.430.048,11 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 6.000.000 | 100 | 6.066.679,82 | 100 | 6.157.092,82 | 100 | 6.282.725,06 | 100 | 6.430.048,11 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sumberasih | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 6.000.000 | | 6.066.679,82 | | 6.157.092,82 | | 6.282.725,06 | | 6.430.048,11 | | |
| Terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka | 0 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.066.679,82 | 2 | 6.157.092,82 | 2 | 6.282.725,06 | 2 | 6.430.048,11 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| efisien, dan akuntabel | Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 0 | 2 | | | | | | | | | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 3.000.000 | | 3.033.339,92 | | 3.078.546,42 | | 3.141.362,56 | | 3.215.024,06 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 0 | 2 | 3.000.000 | | 3.033.339,92 | | 3.078.546,42 | | 3.141.362,56 | | 3.215.024,06 | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 3.000.000 | | 3.033.339,9 | | 3.078.546,4 | | 3.141.362,5 | | 3.215.024,05 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 0 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.033.339,9 | 2 | 3.078.546,4 | 2 | 3.141.362,5 | 2 | 3.215.024,05 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas. Penetapannya berlandaskan pada isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kemampuan pendanaan daerah. Secara eksplisit, Program Prioritas Kecamatan Sumberasih dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Sumberasih** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | SAE KERJA |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberasih sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberasih**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Sumberasih | | | | | | | | | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 91,00 | |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 85,13 | 87,8 | 88,68 | 89,56 | 90,46 | 91,36 | 92,28 | |
| 3. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Sumberasih sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sumberasih**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | | | | | | | | | | |
| | **NIHIL** | | | | | | | | | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Sumberasih.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Sumberasih.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Sumberasih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Sumberasih.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Sumberasih. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;

2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;
3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

CAMAT Sumberasih
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN SUMBERASIH

**AGUS SETIJONO, S.Sos**
Pembina Tk I
NIP. 19680814 198809 1 001

# RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN TIRIS

TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, rnarilah kita bersarna-sarna tetap rnelaksanakan amanah dalam bidang tugas kita maslng-maslng bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai. Rencana Strategis Kecamatan Tiris Tahun 2025-2029 disusun untuk rnemberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecarnatan Tiris Kabupaten Probolinggo tahun 2025– 2029 ini rnengacu pada visi, misi dan program Bupati Probolinggo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan sernoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, September 2025

**Camat Tiris**

**ANDIWIROSO.S.Sos**

**Pembina Tk I**

NIP.197008231993021001

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... ii
**DAFTAR ISI** ..... iii
**BAB I** ..... 1
**PENDAHULUAN** ..... 1
**1.1 Latar Belakang** ..... 1
**1.2 Landasan Hukum** ..... 2
**1.3 Maksud dan Tujuan** ..... 5
**1.4 Sistematika Penulisan** ..... 5
**BAB II** ..... 7
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN** ..... 7
**DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
**2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Tiris** ..... **7**
**2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** ..... **19**
**BAB III** ..... 2**0**
**TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... 2**0**
**3.1 Tujuan Renstra Kecamatan TirisTahun 2025-2029** ..... 2**0**
**3.2 Sasaran Renstra Kecamatan TirisTahun 2025-2029** ..... 2**3**
**3.3 Straregi Kecamatan Tiris dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025- 2029** ..... 25
**3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan TirisTahun 2025-2029** ..... 29
**BAB IV** ..... 31
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** ..... 31
**4.1 Uraian Program** ..... 31
**4.2 Uraian Kegiatan** ..... 33
**BAB V** ..... 47
**PENUTUP** ..... 47

# DAFTAR TABEL

*Tabel 2.1.b.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Tiris Berdasarkan pangkat dan Golongan tahun 2025*

*Tabel 2.1.b.2 Jumlah Sarana Prsasarana Kecamatan Tiris Tahun 2025*

*Tabel 2.1.c Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tiris*

*Tabel 2.2 Isu Strategis Kecamatan Tiris*

*Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 3.3 Penahapan Rencana Strategis (Renstra)*

*Table 3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra)*

*Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) dan Pendanaan*

*Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukum Program Prioritas Pembangunan Daerah*

*Table 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah*

*Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci*

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan TirisKabupaten Probolinggo yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan TirisTahun 2025 - 2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Tiris yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tiris yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Tiris sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Tiris juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Probolinggo, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

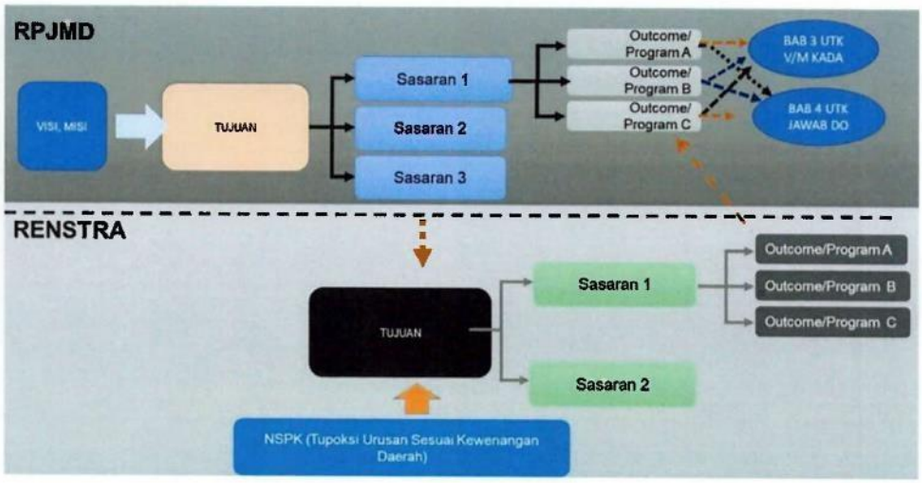


Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Tiris yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Probolinggo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tiris. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tiris dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan ke Tiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentangf Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2024-2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 – 2029 Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 1 Seri D;
36. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo;
37. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 19 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Tiris Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan TirisTahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Tiris ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tiris sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Tiris

### a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Tiris

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatnnya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan Tiris

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan tentang Kedudukan Kabupaten Probolinggo, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Tiris :

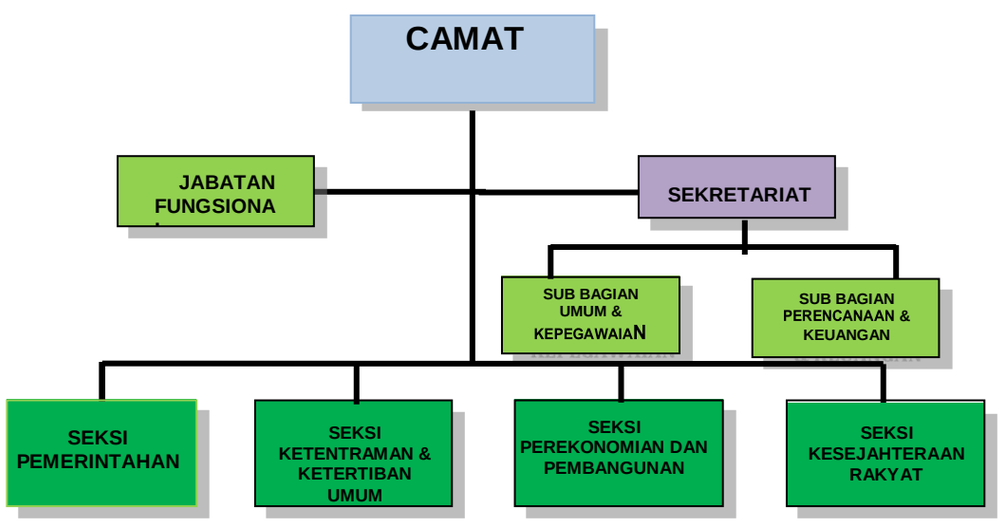

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Tiris Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

(1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;

b. pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;

c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

(1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;

b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;

c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;

d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;

e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;

f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);

g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;

h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai**

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :

a. pelaksanaan urusan administrasi umum;

b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;

c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;

d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;

e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran,

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d. pengelolaan urusan administrasi keuangan; pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. Kepala Seksi Pemerintahan**

(1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

(1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibanumum.

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan KepolisianNegara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

b. persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

c. persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

d. pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata.

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

(1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;

d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomimasyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi

dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;

e. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

8. **Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat**

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat.
(2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. Kelompok Jabatan Fungsional**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan.
(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tiris

Struktur Organisasi Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat.
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Berikut merupakan data pegawai Kecamatan Tiris Tahun 2025 tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.b.1
Data Pegawai Kecamatan Tiris

| No | Uraian | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| I | Pegawai PNS | 14 | 1 | 15 |
| II | Pegawai CPNS | - | - | - |
| III | Pegawai PPPK | - | 0 | 0 |
| IV | Non PNS | 2 | 1 | 3 |
| V | Tingkat Pendidikan CPNS dan PNS : | | | |
| | 1. SLTA | 5 | - | 5 |
| | 2. D-3 | - | - | - |
| | 3. D-4 | - | - | - |
| | 4. S1 | 6 | 1 | 7 |
| | 5. S2 | 3 | 0 | 3 |
| VI | Golongan Kepangkatan CPNS dan PNS: | | | |
| | 1. II a | 1 | - | 1 |
| | 2. II b | - | - | - |
| | 3. II c | - | - | - |
| | 1. II d | 3 | - | 3 |
| | 2. III a | 1 | 1 | 1 |
| | 3. III b | 1 | 0 | 1 |
| | 4. III c | - | 0 | 0 |
| | 5. III d | 5 | 1 | 7 |
| | 9. IV a | 1 | 0 | 1 |
| | 10. IV b | 1 | - | 1 |
| VII | Golongan PPPK: | - | | |
| | | - | - | - |
| V | Agama: | | | |
| | Islam | 18 | 18 | 18 |
| | Katolik | - | - | - |
| | Budha | - | - | - |
| | Hindu | - | - | - |
| | Lainnya | - | - | - |
| VI | Pejabat struktural | 4 | 1 | 5 |
| VII | Fungsional umum/Staf | 11 | | 11 |

Sumber data: Kecamatan Tiris 2025

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Tiris terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Jalan Raya Tiris No. 01 Tiris Kabupaten Probolinggo. Berikut merupakan sarana dan prasarana Kecamatan Tiris :

Tabel 2.1.b.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Tiris

| NO. | URAIAN SARPRAS | JUMLAH | SATUAN |
|---|---|---|---|
| **Sarana** | | | |
| 1 | Mobil Dinas | 1 | Unit |
| 2 | Sepeda Motor Axelo | 5 | Unit |
| 3 | Sepeda Motor Suzuki 110 | 2 | Unit |
| 4 | Sepeda Motor KLX 150 | 1 | Unit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Lemari Besi / Metal | 2 | Buah |
| 6 | Finger Print | 1 | Unit |
| 7 | Genset | 2 | Unit |
| 8 | Lemari Arsip | 2 | Buah |
| 9 | AC | 1 | Unit |
| 10 | Televisi | 1 | Unit |
| 11 | Sound System | 1 | Unit |
| 12 | Papan Pembatas ruangan | 7 | Unit |
| 13 | CCTV | 1 | Unit |
| 14 | Interaktive Dispaly | 1 | Unit |
| 15 | LCD Prjector | 1 | Unit |
| 16 | Lemari Kayu | 3 | Buah |
| 17 | Kursi Tamu | 6 | Buah |
| 18 | Kursi Pelayanan | 4 | Buah |
| 19 | Kursi Tunggu | 2 | Buah |
| 20 | Kursi Rapat | 50 | Buah |
| 21 | Meja Kerja Kayu | 6 | Buah |
| 22 | Kasur / Springbed | 1 | Buah |
| 23 | Lemari Es | 1 | Buah |
| 24 | Sanyo Air | 2 | Unit |
| 25 | Top Speaker | 1 | Unit |
| 26 | Power Fan | 6 | Unit |
| 27 | Alat Pemadam / Portable | 1 | Unit |
| 28 | Meja tulis | 3 | Buah |
| 29 | Rak / Credenza | 1 | Buah |
| 30 | Meja Pelayanan | 1 | Buah |
| 31 | Meja Kerja Pejabat Eselon | 0 | Buah |
| 32 | Meja Kerja Pelaksana | 2 | Buah |
| 33 | Meja Rapat | 4 | Buah |
| 34 | Kursi rapat pejabat | 2 | Buah |
| 35 | Kursi kerja pelaksana | 6 | Buah |
| 36 | Kursi kerja pejabat eselon IV | 6 | Buah |
| 37 | Kamera Digital | 2 | Unit |
| 38 | Audio Mixing Portable | 1 | Unit |
| 39 | Wireless Audio Conference | 1 | Unit |
| 40 | Web Camera Conference | 1 | Unit |
| 41 | Loudspeaker | 2 | Unit |
| 42 | Tablet | 0 | Unit |
| 43 | Kursi dorong | 1 | Buah |
| 44 | PC Unit | 5 | Unit |
| 45 | Laptop | 12 | Unit |
| 46 | Note Book | 7 | Unit |
| 47 | Onboard Computer (OPS) | 1 | Unit |
| 48 | Printer | 5 | Unit |
| 49 | Scanner | 2 | Unit |
| 50 | Barcorde Scanner | 1 | Unit |
| 51 | Meja Podium | 1 | Buah |
| 52 | Pendopo | 1 | Unit |
| 53 | Gedung Kantor | 1 | Unit |
| 54 | Rumah Dinas | 1 | Unit |

| Prasarana | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Internet | 2 | Unit |
| 2 | Instalasi Listrik | 10.400 w | VA |

**c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tiris**

Kecamatan Tiris menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tiris dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **baik** dengan **rasio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Tiris berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 80,13 (2021) menjadi 84,28 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2022.
- **Persentase pelayanan publik sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 80% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator **nilai SAKIP** dan **reformasi birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian NA di Tahun 2024 yaitu 72,21, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data perbandingan antara realisasi dan capaian berbasis kinerja dengan realisasi dan capaian berbasis Anggaran di dalam Indikator kinerja (IKU) kecamatan Tiris yaitu:

- IKU Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas dengan target 100%, capaian kinerja 84,28% dengan capaian realisasi anggaran 99,71% dengan tingkat efisiensi -15,73% kategori belum efisien.
- IKU Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi target 100%,

capaian kinerja 99% dengan capaian realisasi anggaran 99,75% dengan tingkat efisiensi -0,75% kategori belum efisien.

- IKU Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan target 100%, capaian kinerja 95% dengan capaian realisasi anggaran 99,80% dengan tingkat efisiensi -4,8% kategori belum efisien
- IKU Persentase desa/kelurahan yang telah dibina target 100%, capaian kinerja 90% dengan capaian realisasi anggaran 0% dengan tingkat efisiensi 90% kategori efisien**,** kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan tugas - tugas pelimpahan yang dilaksanakan oleh kecamatan
- IKU Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah target 0,5%, realisasi dan capaian nilai AKIP Tahun 2024 oleh APIP di Bulan Maret 2025 yaitu 72,21.

  Secara keseluruhan, Kecamatan Tiris menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

**Tabel 2.1.1.c**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tiris**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | SPM | Target Indikator Lainnya | Realisasi 2020 | Target Renstra perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | | | | | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 81,96% | 84,73% | 84,28 % | 0,75% | 0,82% | 0,85% | 0,84% | 5,7% | 81% |
| 2 | Persentase desa/keluarahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan | | | | | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 86.91% | 93,4% | 95% | 0,92% | 0,87% | 0,93% | 0,95% | 8,9% | 90% |
| 3 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | | | | | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 95% | 99% | 99,75% | 0,92% | 0,95% | 0,99% | 1% | 2,10% | 93% |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | | | | | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0,90% | 0% | 0% |
| 5 | Meningkatkan tata kelola birokrasi Perangkat Daerah | | | | | 71,24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71,95 | 71,15 | 71,71 | 72,21 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 2,5% | 71 |

Kecamatan Tiris menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai mendekati target, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 84,28, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, , umumnya berkinerja "**Baik"**. Kecamatan Tiris telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

**d. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Tiris**

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana

organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tiris dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.2
## Isu Strategis Kecamatan Tiris

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Potensi Pertanian dan Perkebunan | Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan Publik | Terdapatnya lahan yang terkontaminasi oleh Limbah B3 kegiatan Industri besar di sekitar sungai besar | Desentralisasi dan Otonomi Daerah | Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan | Keterbatasan Kewenangan Kecamatan | Belum Optimalnya Penyelanggaraan Pelayanan Kecamatan |
| Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa | Banyaknya Masyarakat Yang perpendidikan sangat rendah Teruntama Pada Masyarakat Pesesir Hutan Desa Andungbiru,Andungsari,Tlogosari,Ranugedang,Pedagangan Tegalwatu Kecamatan Tiris | Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal | Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan | Disparitas Antar Wilayah | Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa |
| Potensi Wisata | | Adanya lahan terkontaminasi Limbah B3 di Kecamatan Tiris. | Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan | Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor | Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten | |
| Potensi Sumber Daya Manusia | | Pembuangan Limbah B3 Industri Kecil di Kecamatan Tiris | Digitalisasi dan Pelayanan Publik | Pelayanan Publik yang Belum Optimal | Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu | |
| Potensi Desa Wisata dan Agrowisata | | Terdapat Hutan Dan Aliran sungai serta Air Terjun di sepajang Sungai Kali Pekalen di Kecamatan Tiris | Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis | Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi | Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan untuk mewujudkan swasembada pangan Nasional | | Adanya banjir yang terjadi di Kecamatan Tiris pada Desa Andungbiru, andungsari, Tiris, Ranuagung dan Ranugedang,jangkang | Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan | Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan | Lemahnya Implementasi e-Government | |
| | | Layanan pencegahan proteksi kebakaran belum dilakukan dengan optimal di Kecamatan Tiris, | Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat | Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial | Partisipasi Masyarakat dan Transparansi | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adanya bangunan liar di Kecamatan Tiris | | Penanganan Konflik Sosial dan Bencana | | |
| | | Masih adanya kasus stunting di Kecamatan Tiris | | | | |
| | | Rendahnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di Tiris | | | | |
| | | Menurunnya nilai wawasan kebangsaan generasi muda (di seluruh Kabupaten Probolinggo). | | | | |

# BAB III
# TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Tiris Tahun 2025 - 2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Tiris Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan Tiris menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***. Tujuan tersebut selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: "***Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif***". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tiris, dalam hal ini Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Tiris Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Tiris menetapkan sasaran strategi ”Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tiris tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Tiris

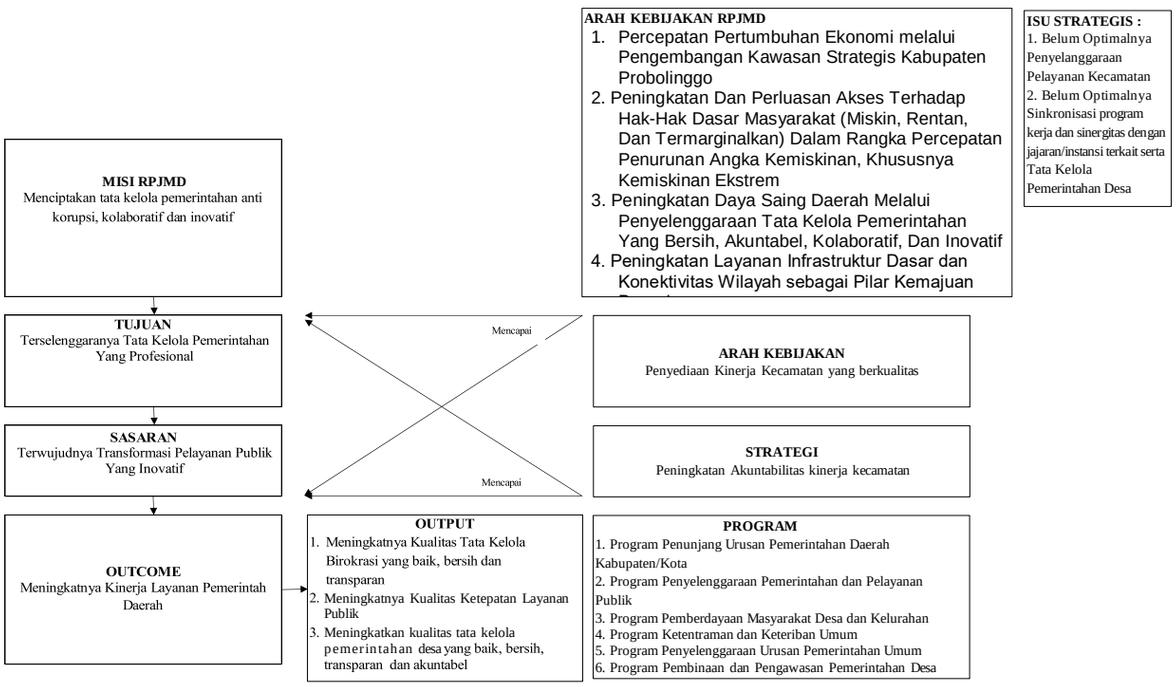


RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi Kepala Daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Tiris yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah

3. Menjadi dasar penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Renja (Rencana Kerja) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

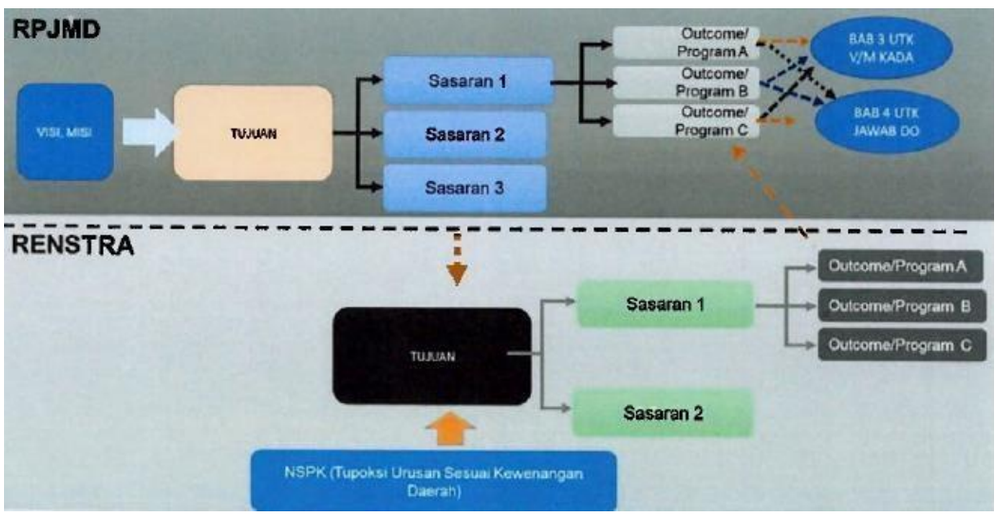


**Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tiris** adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. **Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :**

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (**Specific**, **Measurable**, **Achievable, Relevant, Time-bound**) secara Lengkap

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tiris dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tiris

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Ikdeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (RPJMD) | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,5 | 90,00 | 91,00 | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | 81,94 | 82.76 | 83.89 | 84,42 | 85,27 | 86,12 | Nilai SKM e SUKMA Prop Jatim |

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Serta memperhatikan Devinisi Operasional sudah ditetapkan dengan perhitungan rumus yang telah ditentukan.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam **Strategi Pembangunan**, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam **Arah Kebijakan**, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan,

peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.2.2 Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

| | | | |
|---|---|---|---|
| VISI : **TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO SAE, SEJAHTERA, AMANAH RELIGIUS SERTA EXSIS BERDAYA SAING** | | | |
| MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif | | | |
| **TUJUAN / INDIKATOR** | **SASARAN / INDIKATOR** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif<br><br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah<br>Indikator :<br>Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah<br>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Indikator :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan | Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan` | 1 Penguatan Sistem Perencanaan dan pengukuran Kinerja<br>2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan<br>3 Pemanfaatan Teknologi Informasi<br>4 Transparansi dan Pelibatan Publik<br>5 Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan kecamatan | 1 Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik<br>2 Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi<br>3 Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting<br>4 Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran<br>5 Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat |
| | | Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat di kecamatan | 1 Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses<br>2 Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan<br>3 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan<br>4 Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik<br>5 Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas |

## 3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan TirisTahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

**Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Tiris** sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. **Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Tiris:**

1. Meningkatkan **ketepatan sasaran** program/kegiatan.
2. Mempermudah **koordinasi antarperangkat daerah**.
3. Mendukung **pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah**.
4. Menunjang **penggunaan sistem informasi pembangunan daerah**.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik) | Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik) | Permberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat) | Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes serta Koperasi Merah Putih) | Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat) |

## 3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tiris Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Tiris sebagai berikut :

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Tiris

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN ) Mempercepat | 1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Probolinggo | 1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan<br>2. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja<br>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi<br>4. Transparansi dan Pelibatan Publik<br>5. Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten<br>6. Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik<br>7. Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi<br>8. Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting<br>9. Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran<br>10. Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat<br>11. Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah diakses<br>12. Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan | |
| 2 | Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata (SAE INFRASTRUKTUR) | 2. Peningkatan Dan Perluasan Akses Terhadap Hak-Hak Dasar Masyarakat (Miskin, Rentan, Dan Termarginalkan) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan, Khususnya Kemiskinan Ekstrem | | |
| 3 | Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan (SAE EKONOMI) Peningkatan kemandirian Masyarakat Miskin | 3. Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Kolaboratif, Dan Inovatif | | |
| 4 | Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau (SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN) | 4. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah sebagai Pilar Kemajuan Daerah | | |
| 5 | Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas (SAE SOSIAL) | | | |

**Sumber Data : RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo; Lampiran Perda Nomor 5 Tahun 2025 Bab 3 halaman III/59**

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Tiris ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Tiris adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam memberdayakan kelompok – kelompok masyarakat desa dan kelurahan untuk wujudkan peningkatan pendidikan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang adil , merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan

pembangunan jangka menengah (RPJMD).

d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat pedesaan dan kelurahan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkuan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan sebagai sarana komunikasi serta menampung aspirasi dan permasalahan dimasyarakat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang menyediakan layanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik di kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tirismerupakan **Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya**, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Tiris juga merupakan proses strategis yang harus **terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah**. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tiris serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tiris dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tiris

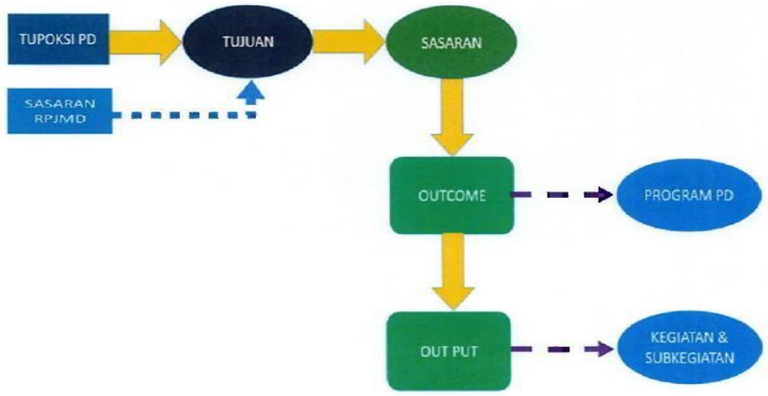


**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.977.214.832,78 | | 3.010.301.532,51 | | 3.055.164.690,86 | | 3.117.503.730,61 | | 3.190.605.770,28 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.785.259.832,78 | | 2.816.213.277,85 | | 2.858.183.898,02 | | 2.916.503.647,57 | | 2.984.892.455,98 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 100 | 100 | 100 | 2.785.259.832,78 | 100 | 2.816.213.277,85 | 100 | 2.858.183.898,02 | 100 | 2.916.503.647,57 | 100 | 2.984.892.455,98 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 10.088.000 | | 10.200.111,03 | | 10.352.125,44 | | 10.563.355,15 | | 10.811.054,23 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 10.088.000 | 100 | 10.200.111,03 | 100 | 10.352.125,44 | 100 | 10.563.355,15 | 100 | 10.811.054,23 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 29.050.000 | | 29.372.841,54 | | 29.810.591,19 | | 30.418.860,73 | | 31.132.149,62 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 29.050.000 | 100 | 29.372.841,54 | 100 | 29.810.591,19 | 100 | 30.418.860,73 | 100 | 31.132.149,62 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 78.081.000 | | 78.948.738,05 | | 80.125.327,74 | | 81.760.243,2 | | 83.677.431,14 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 78.081.000 | 100 | 78.948.738,05 | 100 | 80.125.327,74 | 100 | 81.760.243,2 | 100 | 83.677.431,14 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 63.888.000 | | 64.598.006,9 | | 65.560.724,61 | | 66.898.456,96 | | 68.467.152,32 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 63.888.000 | 100 | 64.598.006,9 | 100 | 65.560.724,61 | 100 | 66.898.456,96 | 100 | 68.467.152,32 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 10.848.000 | | 10.968.557,14 | | 11.132.023,86 | | 11.359.167 | | 11.625.526,99 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 10.848.000 | 100 | 10.968.557,14 | 100 | 11.132.023,86 | 100 | 11.359.167 | 100 | 11.625.526,99 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2977214832.78 | | 3010301532.51 | | 3055164690.86 | | 3117503730.61 | | 3190605770.28 | |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan

Tirisadalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk menunjang kinerja pelayanan publik kecamatan serta menjalankan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Tiris, maka dapat dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Tiris dijelaskan pada pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Tiris

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**
**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| **7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Tiris** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas tata kelola perangkat daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | |

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan **penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah**, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

## TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.977.214.832,78 | | 3.010.301.532,51 | | 3.055.164.690,86 | | 3.117.503.730,61 | | 3.190.605.770,28 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.785.259.832,78 | | 2.816.213.277,85 | | 2.858.183.898,02 | | 2.916.503.647,57 | | 2.984.892.455,98 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 100 | 100 | 2.785.259.832,78 | 100 | 2.816.213.277,85 | 100 | 2.858.183.898,02 | 100 | 2.916.503.647,57 | 100 | 2.984.892.455,98 | 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Tiris | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4.544.000 | | 4.100.000 | | 4.560.000 | | 5.000.000 | | 5.000.006 | | |
| Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 8 | 8 | 4.544.000 | 8 | 4.100.000 | 8 | 4.560.000 | 8 | 5.000.000 | 8 | 5.000.006 | | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 8 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1.522.000 | | 1.200.000 | | 1.330.000 | | 1.450.000 | | 1.000.006 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 8 | 8 | 1.522.000 | 8 | 1.200.000 | 8 | 1.330.000 | 8 | 1.450.000 | 8 | 1.000.006 | | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1.522.000 | | 1.200.000 | | 1.330.000 | | 1.450.000 | | 1.600.000 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 8 | 8 | 1.522.000 | 8 | 1.200.000 | 8 | 1.330.000 | 8 | 1.450.000 | 8 | 1.600.000 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.500.000 | | 1.700.000 | | 1.900.000 | | 2.100.000 | | 2.400.000 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 8 | 20 | 1.500.000 | 20 | 1.700.000 | 20 | 1.900.000 | 20 | 2.100.000 | 20 | 2.400.000 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.514.830.545 | | 2.498.992.086 | | 2.509.755.309 | | 2.532.816.333 | | 2.563.552.353 | | |
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 40.060.000 | 12 | 43.318.000 | 12 | 47.649.800 | 12 | 52.414.780 | 12 | 57.656.258 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 40.060.000 | | 43.318.000 | | 47.649.800 | | 52.414.780 | | 57.656.258 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 40.060.000 | 12 | 43.318.000 | 12 | 47.649.800 | 12 | 52.414.780 | 12 | 57.656.258 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 100 | 15 | 2.474.750.545 | 15 | 2.455.674.086 | | 2.462.105.509 | 15 | 2.480.401.553 | 15 | 2.505.896.095 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (06) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (16) |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.474.750.545 | | 2.455.674.088 | | 2.462.105.509 | | 2.480.401.553 | | 2.505.896.095 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 180 | 15 | 2.474.750.545 | 15 | 2.455.674.088 | | 2.462.105.509 | 15 | 2.480.401.553 | 15 | 2.505.896.095 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 65.442.200 | | 66.058.110 | | 72.389.000 | | 79.977.466 | | 87.786.813 | | |
| Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 65.442.200 | 2 | 66.058.110 | 2 | 72.389.000 | 2 | 79.977.466 | 2 | 87.786.813 | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.730.000 | | 4.103.110 | | 4.513.000 | | 4.964.000 | | 5.461.000 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 3.730.000 | 2 | 4.103.110 | 2 | 4.513.000 | 2 | 4.964.000 | 2 | 5.461.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 9.472.200 | | 4.840.000 | | 5.324.000 | | 5.856.000 | | 6.442.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 9.472.200 | 2 | 4.840.000 | 2 | 5.324.000 | 2 | 5.856.000 | 2 | 6.442.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 2.610.000 | | 2.871.000 | | 3.158.000 | | 3.474.000 | | 3.821.000 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | 2.610.000 | 4 | 2.871.000 | 4 | 3.158.000 | 4 | 3.474.000 | 4 | 3.821.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 38.770.000 | | 42.750.000 | | 46.900.000 | | 51.600.000 | | 56.760.000 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 38.770.000 | 12 | 42.750.000 | 12 | 46.900.000 | 12 | 51.600.000 | 12 | 56.760.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 9.860.000 | | 9.994.000 | | 10.994.000 | | 12.093.466 | | 13.302.813 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 9.860.000 | 12 | 9.994.000 | 12 | 10.994.000 | 12 | 12.093.466 | 12 | 13.302.813 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01.01.2.06.0006 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1.000.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.500.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 2.869.000 | | 2.938.000 | | 3.215.000 | | 3.321.500 | | 3.625.000 | | |
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 2.869.000 | 2 | 2.938.000 | 3 | 3.215.000 | 4 | 3.321.500 | 4 | 3.625.000 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 2.869.000 | | 2.938.000 | | 3.215.000 | | 3.321.500 | | 3.625.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 2.869.000 | 2 | 2.938.000 | 3 | 3.215.000 | 4 | 3.321.500 | 4 | 3.625.000 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 148.551.287 | | 190.200.000 | | 208.947.000 | | 230.139.000 | | 253.154.000 | | |
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya ATK, ATL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 148.551.287 | 12 | 190.200.000 | 12 | 208.947.000 | 12 | 230.139.000 | 12 | 253.154.000 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 21.159.000 | | 23.275.000 | | 25.600.000 | | 28.163.000 | | 30.979.000 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 21.159.000 | 12 | 23.275.000 | 12 | 25.600.000 | 12 | 28.163.000 | 12 | 30.979.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.928.000 | | 3.300.000 | | 3.360.000 | | 3.990.000 | | 4.390.000 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 5.928.000 | 1 | 3.300.000 | 1 | 3.360.000 | 1 | 3.990.000 | 1 | 4.390.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 121.464.287 | | 163.625.000 | | 179.987.000 | | 197.986.000 | | 217.785.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 121.464.287 | 12 | 163.625.000 | 12 | 179.987.000 | 12 | 197.986.000 | 12 | 217.785.000 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 49.022.800,78 | | 53.925.081,85 | | 59.317.589,02 | | 65.249.348,57 | | 71.774.283,98 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 8 | 26.000.000 | 8 | 28.600.000 | 8 | 31.460.000 | 8 | 34.606.000 | 8 | 38.066.600 | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 26.000.000 | | 28.600.000 | | 31.460.000 | | 34.606.000 | | 38.066.600 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 8 | 26.000.000 | 8 | 28.600.000 | 8 | 31.460.000 | 8 | 34.606.000 | 8 | 38.066.600 | | |
| Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 23.022.800,78 | 1 | 25.325.081,85 | 1 | 27.857.589,02 | 1 | 30.643.348,57 | 1 | 33.707.683,98 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 23.022.800,78 | | 25.325.081,85 | | 27.857.589,02 | | 30.643.348,57 | | 33.707.683,98 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 23.022.800,78 | 1 | 25.325.081,85 | 1 | 27.857.589,02 | 1 | 30.643.348,57 | 1 | 33.707.683,98 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 10.088.000 | | 10.200.111,03 | | 10.352.125,44 | | 10.563.355,15 | | 10.811.054,23 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 10.088.000 | 100 | 10.200.111,03 | 100 | 10.352.125,44 | 100 | 10.563.355,15 | 100 | 10.811.054,23 | 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Tirta | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 5.632.000 | | 5.550.111,02 | | 5.830.000,22 | | 5.920.000 | | 5.950.000 | | |
| Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 4 | 3 | 5.632.000 | 3 | 5.550.111,02 | 3 | 5.830.000,22 | 3 | 5.920.000 | 3 | 5.950.000 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 5.632.000 | | 5.550.111,02 | | 5.830.000,22 | | 5.920.000 | | 5.950.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 4 | 3 | 5.632.000 | 3 | 5.550.111,02 | 3 | 5.830.000,22 | 3 | 5.920.000 | 3 | 5.950.000 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 4.456.000 | | 4.650.000,01 | | 4.522.125,22 | | 4.643.355,15 | | 4.861.054,23 | | |
| Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | 4.456.000 | 6 | 4.650.000,01 | 6 | 4.522.125,22 | 6 | 4.643.355,15 | 6 | 4.861.054,23 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 4.456.000 | | 4.650.000,01 | | 4.522.125,22 | | 4.643.355,15 | | 4.861.054,23 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | 4.456.000 | 6 | 4.650.000,01 | 6 | 4.522.125,22 | 6 | 4.643.355,15 | 6 | 4.861.054,23 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 29.050.000 | | 29.372.841,54 | | 29.810.591,19 | | 30.418.860,73 | | 31.132.149,62 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 29.050.000 | 100 | 29.372.841,54 | 100 | 29.810.591,19 | 100 | 30.418.860,73 | 100 | 31.132.149,62 | 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Tirta | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 29.050.000 | | 29.372.841,54 | | 29.810.591,19 | | 30.418.860,73 | | 31.132.149,62 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 29.050.000 | 3 | 29.372.841,54 | 3 | 29.810.591,19 | 3 | 30.418.860,73 | 3 | 31.132.149,62 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 13.862.000 | | 11.200.000 | | 14.498.591 | | 15.056.860 | | 11.650.000 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 8 | 8 | 13.862.000 | 8 | 11.200.000 | 8 | 14.498.591 | 8 | 15.056.860 | 8 | 11.650.000 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 9.276.000 | | 9.300.000 | | 9.400.000 | | 9.450.000 | | 9.540.000 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 9.276.000 | 3 | 9.300.000 | 3 | 9.400.000 | 3 | 9.450.000 | 3 | 9.540.000 | | |
| 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 5.912.000 | | 8.872.841,54 | | 5.912.000,19 | | 5.912.000,73 | | 9.942.149,62 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | 5.912.000 | 3 | 8.872.841,54 | 3 | 5.912.000,19 | 3 | 5.912.000,73 | 3 | 9.942.149,62 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 78.061.000 | | 78.948.738,05 | | 80.125.327,74 | | 81.760.243,2 | | 83.677.431,14 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Presentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 78.061.000 | 100 | 78.948.738,05 | 100 | 80.125.327,74 | 100 | 81.760.243,2 | 100 | 83.677.431,14 | 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Tirta | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 78.061.000 | | 78.948.738,05 | | 80.125.327,74 | | 81.760.243,2 | | 83.677.431,14 | | |
| terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | 78.061.000 | 14 | 78.948.738,05 | 14 | 80.125.327,74 | 14 | 81.760.243,2 | 14 | 83.677.431,14 | | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 68.701.000 | | 70.000.000 | | 71.175.327,74 | | 72.810.243,2 | | 74.727.431,14 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | 68.701.000 | 14 | 70.000.000 | 14 | 71.175.327,74 | 14 | 72.816.243,2 | 14 | 74.727.431,14 | | |
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 9.380.000 | | 8.948.738,05 | | 8.950.000 | | 8.950.000 | | 8.950.000 | | |
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 4 | 4 | 9.380.000 | 4 | 8.948.738,05 | 4 | 8.950.000 | | 8.950.000 | 4 | 8.950.000 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 63.888.000 | | 64.598.006,9 | | 65.560.724,61 | | 66.898.456,96 | | 68.467.152,32 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Presentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 63.888.000 | 100 | 64.598.006,9 | 100 | 65.560.724,61 | 100 | 66.898.456,96 | 100 | 68.467.152,32 | 7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Tiris | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 63.888.000 | | 64.598.006,9 | | 65.560.724,61 | | 66.898.456,96 | | 68.467.152,32 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 6 | 1.605 | 63.888.000 | 1.605 | 64.598.006,9 | 1.605 | 65.560.724,61 | 1.605 | 66.898.456,96 | 1.605 | 68.467.152,32 | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 63.888.000 | | 64.598.006,9 | | 65.560.724,61 | | 66.898.456,96 | | 68.467.152,32 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 6 | 1.605 | 63.888.000 | 1.605 | 64.598.006,9 | 1.605 | 65.560.724,61 | 1.605 | 66.898.456,96 | 1.605 | 68.467.152,32 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 10.848.000 | | 10.968.557,14 | | 11.132.023,86 | | 11.359.167 | | 11.625.526,99 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Presentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 10.848.000 | 100 | 10.968.557,14 | 100 | 11.132.023,88 | 100 | 11.359.167 | 100 | 11.625.526,99 | 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Tiris | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 10.848.000 | | 10.968.557,14 | | 11.132.023,88 | | 11.359.167 | | 11.625.526,99 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 10.848.000 | 2 | 10.968.557,14 | 2 | 11.132.023,88 | 2 | 11.359.167 | 2 | 11.625.526,99 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | 3.616.000 | | 3.616.000,14 | | 3.616.000 | | 3.616.000 | | 3.616.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 3.616.000 | 2 | 3.616.000,14 | 2 | 3.616.000 | 2 | 3.616.000 | 2 | 3.616.000 | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 3.616.000 | | 3.616.000 | | 3.616.000 | | 3.616.000 | | 3.616.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 3.616.000 | 2 | 3.616.000 | 2 | 3.616.000 | 2 | 3.616.000 | 2 | 3.616.000 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 3.616.000 | | 3.736.557 | | 3.900.023,88 | | 4.127.167 | | 4.393.526,99 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 3.616.000 | 2 | 3.736.557 | 2 | 3.900.023,88 | 2 | 4.127.167 | 2 | 4.393.526,99 | | |

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah yang tertuang dalam Lampiran Perda RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Nomor 5 Tahun 2025 Bab 3 tentang Program Prioritas RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 halaman III/85 di Misi 1 SAE PEMERINTAHAN Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif dengan Program Prioritas 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK. Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4

Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gending** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |

dikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tiris sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tiris

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gending | | | | | | | | | |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 84,28 | 85,12 | 85,97 | 86,83 | 87,7 | 88,58 | 89,46 | |
| 3. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 72,21 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)** adalah **ukuran keberhasilan yang bersifat operasional** dan digunakan untuk menilai capaian **kinerja kegiatan atau sub kegiatan** dalam rangka mendukung pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** perangkat daerah. **Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Tiris** sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.6 dibawah ini

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Tiris

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1. | 7.01 - KECAMATAN | | | | | | | | | | |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | positif | Indeks | 84,28 | 85,12 | 85,97 | 86,83 | 87,7 | 88,58 | 89,46 | |

# BAB V

# PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Tiris.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Tiris.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, September 2025

**Camat Tiris**

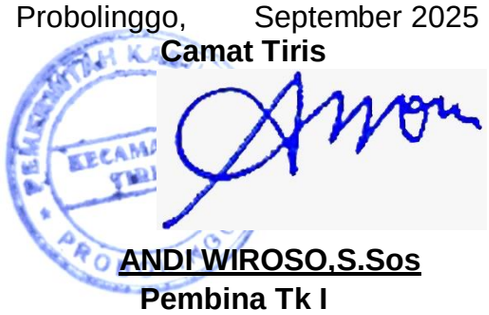

**ANDI WIROSO,S.Sos**

**Pembina Tk I**

**NIP.197008231993021001**

# RENCANA STRATEGI

# RENSTRA

## KECAMATAN WONOMERTO

## 2025 -2029


https://wonomerto.probolinggokab.go.id

kecamatanwonomerto@gmail.com

JL.RAYA WONOMERTO NO 6

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonomerto Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Wonomerto Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Wonomerto. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Wonomerto. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Wonomerto dengan Kecamatan dan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.

Wonomerto, 20 September 2025

Plt.CAMAT WONOMERTO

KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO KECAMATAN WONOMERTO

**RASYIDHI.S.Sos.M.M**

Pembina

NIP. 19730506 199602 1 003

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 6
1.4 Sistematika Penulisan ..... 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Wonomerto ..... 10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Wonomerto .....
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonomerto ..... 21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 27
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Wonomerto .... 27
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Wonomerto ..... 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonomerto Tahun 2025-2029 .....
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Wonomerto dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 40
4.1 Uraian Program ..... 40
4.2 Uraian Kegiatan ..... 44
BAB V PENUTUP ..... 79
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 79
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 80

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..…….. 18
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ……..…… 19
Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..….. 19
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ……. 21
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo (2020-2024) …… 22
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Wonomerto ……..... 31`
Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 …….. 36
Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Wonomerto …… 37
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Wonomerto ……....39
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Wonomerto ……40
Tabel 4.1 Program Kecamatan Wonomerto ……43
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Wonomerto ……47
Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Wonomerto …….. 56
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Wonomerto ……59
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… 76
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wonomerto ……..77
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Wonomerto ……77

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Wonomerto .....17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo ..... 34
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah ..... 35
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Wonomerto .....46

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Wonomerto menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonomerto setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Wonomerto juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Wonomerto. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Wonomerto berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Wonomerto terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonomerto yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Wonomerto untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Wonomerto berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Wonomerto dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Wonomerto disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Wonomerto akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Wonomerto dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Wonomerto untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Wonomerto berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan

Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta Pembangunan wilayah melalui Perencanaan yang sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN WONOMERTO**

Bab II memuat :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wonomerto
2.2 Sumber Daya Kecamatan Wonomerto
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonomerto
2.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Wonomerto
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Wonomerto

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonomerto Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Wonomerto dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Wonomerto 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wonomerto; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wonomerto

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Wonomerto Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
   b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;

c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;

b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Wonomerto**

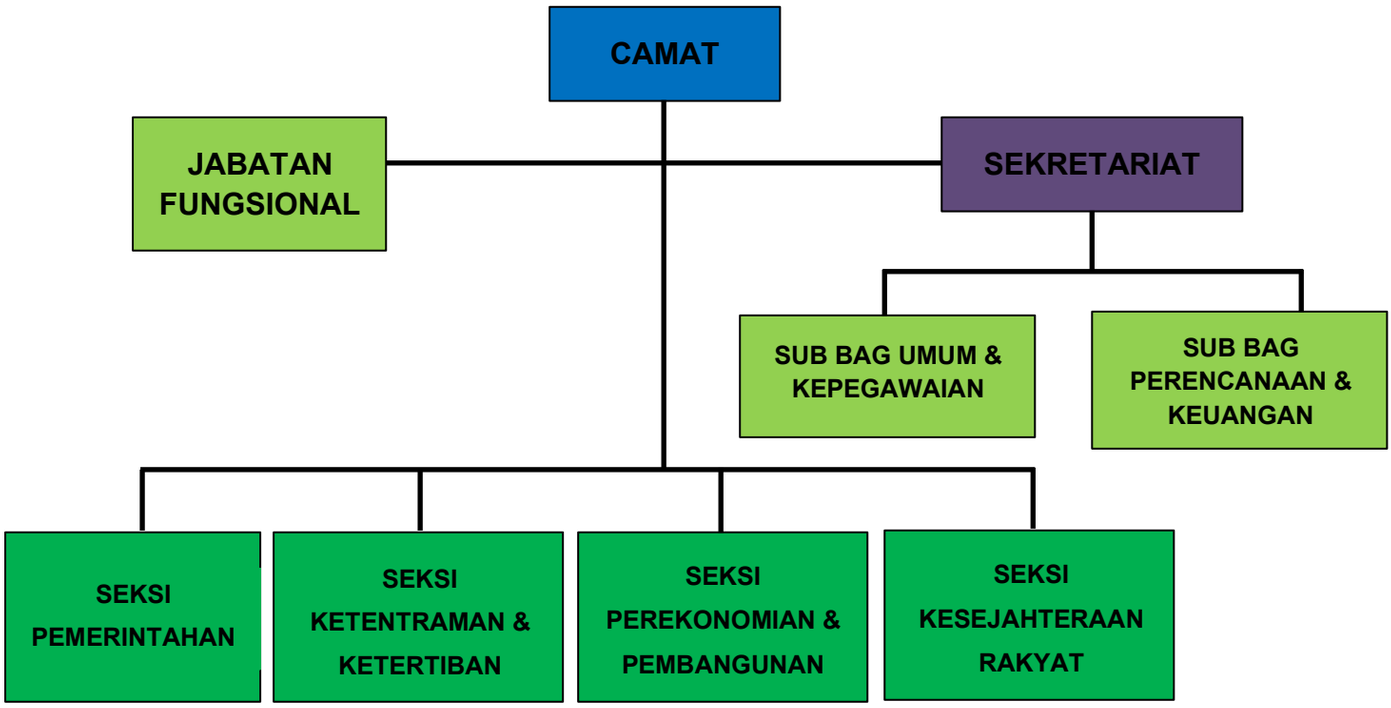


Struktur Organisasi Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Wonomerto

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional

dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Wonomerto.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Wonomerto sebanyak 21 orang dengan rincian : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 12 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 2 orang dari perempuan sebanyak 2 orang. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 7 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Wonomerto berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 4. | Plt. Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | **2** |
| 6. | Plt. Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | **2** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | **2** |
| 10. | Honorer | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | **7** |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **10** | **0** | **9** | **2** | **16** | **5** | **21** |

***Sumber Data : Kecamatan Wonomerto***

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan**

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | **16** | 1 | 4 | 6 | 5 | **16** |
| 2. | Perempuan | - | 0 | 1 | - | 2 | 2 | **5** | - | - | 3 | 2 | **5** |
| **Jumlah** | | **-** | **4** | **8** | **0** | **2** | **7** | **21** | **1** | **4** | **9** | **7** | **21** |

***Sumber Data : Kecamatan Wonomerto***

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.3**

**Jumlah Sarana Prasarana**

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendaraan Dinas Roda 4 | 2 | 2 | |
| 2 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 21 | 15 | 6 |
| 3 | Propile Proyektor Toyo Serie | 1 | 1 | |
| 4 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 1 | | 1 |
| 5 | Gerobak Dorong | 1 | | 1 |
| 6 | Genzet | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Lemari Penyimpan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lemari Besi/Metal | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Lemari Kayu | 5 | 5 | 0 |
| 10 | Rak Besi | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Rak Kayu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filing Cabinet Kayu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filing Cabinet Besi | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Peti Uang/Cash Box/Coin Box (Brankas) | 1 | 1 | 0 |
| 15 | CCTV - Camera Control TeleTujuanon System | 5 | 0 | 5 |
| 16 | Alat Penghancur Kertas | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Mesin Absensi | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Laser Pointer | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LCD Projector/Infocus | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Alat Kantor Lainnya (Pigora Foto) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Meja Kerja Kayu | 10 | 10 | 0 |
| 22 | Meja Rapat | 4 | 2 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Kursi Rapat | 6 | 6 | 0 |
| 24 | Kursi Lipat | 50 | 50 | 0 |
| 25 | Sofa | 6 | 6 | 0 |
| 26 | Lemari Es | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Kompor Listrik (Alat Dapur) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Teko Listrik | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kitchen Set | 0 | 0 | 0 |
| 30 | TeleTujuan | 2 | 1 | 1 |
| 31 | Sound System | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Wireless | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Dispenser | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Handy Cam | 2 | 2 | 0 |
| 35 | Karpet | 3 | 3 | 0 |
| 36 | Gordyin/Kray | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 2 | 1 | 1 |
| 38 | Kursi Kerja Pejabat lainnya (Kursi Staff) | 8 | 8 | 0 |
| 39 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III | 2 | 2 | 0 |
| 49 | P.C Unit | 4 | 4 | 0 |
| 50 | Lap Top | 7 | 4 | 3 |

***Sumber Data : Kecamatan Wonomerto***

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonomerto

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonomerto yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Wonomerto telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Wonomerto dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

**Tabel 2.3.1**

**Pencapian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 90,2 | 87,66 | 97,49 | #VALUE! | #VALUE! | 90,20 | 87,66 | 97,49 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 92,1 | 100 | 96,16 | #VALUE! | #VALUE! | 92,10 | 100,00 | 96,16 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 92,7 | 76,3 | 97,08 | #VALUE! | #VALUE! | 92,70 | 76,32 | 97,08 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | - | - | - | - | 100 | | | - | - | 95,71 | #VALUE! | #VALUE! | - | - | 95,71 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | - | - | 80 | 80 | 74 | | | 70,31 | 70,46 | 71,36 | #VALUE! | #VALUE! | 87,89 | 88,08 | 96,43 |

***Sumber Data : Data Kecamatan***

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *5* | *6* | *7* | *8* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | **2.719.703.643,00** | **2.577.244.436,00** | - | - | **2.386.332.712,00** | **2.351.093.235,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **87,81** | **87,74** | **91,23** | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 49.800.000,00 | 4.400.000,00 | - | - | 8.400.000,00 | 4.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 41,30 | 16,87 | 90,91 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 33.000.000,00 | - | | | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 49,17 | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | 3.600.000,00 | 1.200.000,00 | | | 3.600.000,00 | 1.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 100,00 | 83,33 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | 3.600.000,00 | - | | | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | 1.800.000,00 | - | | | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | 3.000.000,00 | - | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | 1.800.000,00 | 1.200.000,00 | | | 1.800.000,00 | 1.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 100,00 | 83,33 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.330.171.412,00 | 2.246.928.000,00 | - | - | 2.322.371.412,00 | 2.069.101.762,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90,81 | 99,67 | 92,09 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | 2.279.771.412,00 | 2.187.116.000,00 | - | - | 2.279.771.412,00 | 2.022.948.262,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90,98 | 100,00 | 92,49 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | 34.800.000,00 | 55.412.000,00 | - | - | 34.800.000,00 | 46.153.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 89,43 | 100,00 | 83,29 | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | 3.000.000,00 | - | - | - | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | 3.000.000,00 | 1.200.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | - | 3.000.000,00 | - | - | - | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | 3.600.000,00 | 1.600.000,00 | - | - | 1.800.000,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | 3.000.000,00 | 1.600.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 56.837.300,00 | 33.328.300,00 | - | - | 22.691.300,00 | 25.493.383,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 56,00 | 39,92 | 76,49 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | 8.944.600,00 | 1.936.000,00 | - | - | 8.944.600,00 | 1.234.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,12 | 100,00 | 63,74 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 3.236.000,00 | - | - | - | - | | #DIV/0! | #DIV/0! | 9,46 | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | 9.997.600,00 | 2.777.300,00 | - | - | 9.997.600,00 | 1.787.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 75,67 | 100,00 | 64,34 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | - | 25.000.000,00 | 23.940.000,00 | - | - | - | 18.517.383,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 73,05 | 0,00 | 77,35 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | - | 3.749.100,00 | 4.675.000,00 | - | - | 3.749.100,00 | 3.955.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 100,00 | 84,60 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | 5.910.000,00 | - | - | - | - | | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,44 | 0,00 | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | - | - | - | - | - | | #DIV/0! | #DIV/0! | 86,42 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 32.932.000,00 | 58.392.000,00 | - | - | 16.170.000,00 | 52.751.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengaddan Mebel | | | 16.170.000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 16.762.000,00 | 58.392.000,00 | | | 16.170.000,00 | 52.751.000,00 | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 228.753.064,00 | 207.396.136,00 | - | - | - | 189.364.835,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 71,91 | - | 91,31 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | 2.995.770,00 | 4.753.600,00 | - | - | | 3.184.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 87,37 | 0,00 | 66,98 | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | 29.979.850,00 | 21.840.900,00 | | - | | 19.703.611,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 51,26 | 0,00 | 90,21 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | - | 2.520.000,00 | | - | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 66,33 | #DIV/0! | 0,00 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | 195.777.444,00 | 178.281.636,00 | | - | | 166.477.224,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84,02 | 0,00 | 93,38 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 21.209.867,00 | 26.800.000,00 | - | - | 16.700.000,00 | 10.382.255,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 63,88 | 78,74 | 38,74 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | 16.700.000,00 | 26.800.000,00 | | - | 16.700.000,00 | 10.382.255,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 63,88 | 100,00 | 38,74 | | |
| Pemelharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.970.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | 2.539.867,00 | | | - | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | **64.752.250,00** | **25.000.000,00** | - | - | **64.752.250,00** | **22.400.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **50,51** | **100,00** | **89,60** | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 47.741.800,00 | 16.000.000,00 | - | - | 47.741.800,00 | 15.200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 68,52 | 100,00 | 95,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | - | 47.741.800,00 | 16.000.000,00 | - | - | 47.741.800,00 | 15.200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 74,00 | 100,00 | 95,00 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | - | - | - | - | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 17.010.450,00 | 9.000.000,00 | - | - | 17.010.450,00 | 7.200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 100,00 | 80,00 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | - | - | 17.010.450,00 | 9.000.000,00 | - | - | 17.010.450,00 | 7.200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 100,00 | 80,00 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | - | | | - | - | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | **202.689.739,00** | **34.400.000,00** | **-** | **-** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **84,70** | **9,87** | **58,14** | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 202.689.739,00 | 34.400.000,00 | - | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84,70 | 9,87 | 58,14 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | 20.832.540,00 | 30.400.000,00 | - | - | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 54,05 | 78,24 | 53,62 | | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | - | 181.857.199,00 | 4.000.000,00 | - | - | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 85,61 | 2,03 | 92,50 | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | - | - | - | - | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | | - | - | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | **17.466.270,00** | **36.321.000,00** | **-** | **-** | **7.600.000,00** | **7.600.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **52,56** | **43,51** | **20,92** | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 17.466.270,00 | 36.321.000,00 | - | - | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 52,56 | 43,51 | 20,92 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | 15.666.270,00 | 36.321.000,00 | - | - | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 54,84 | 48,51 | 20,92 | | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | 1.800.000,00 | | - | - | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | **19.800.000,00** | **71.400.000,00** | **-** | **-** | **21.400.000,00** | **21.400.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **40,84** | **108,08** | **29,97** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 19.800.000,00 | 71.400.000,00 | - | - | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 40,84 | 108,08 | 29,97 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | - | 19.800.000,00 | 71.400.000,00 | - | - | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 40,84 | 108,08 | 29,97 | | |
| **Jumlah** | **-** | **-** | **3.024.411.902,00** | **2.744.365.436,00** | **-** | **-** | **2.500.084.962,00** | **2.422.493.235,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **86,07** | **82,66** | **88,27** | | |

***Sumber Data : Evaluasi Kinerja Kecamatan 2023-2024***

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah Kecamatan Wonomerto :

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wonomerto

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan :

- **Keterbatasan Sumber Daya** : Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur** : Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.
- **Birokrasi yang Kaku** : Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.

- **Akses dan Kesenjangan Digital** : Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah** : Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital** : Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar-Sektor** : Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur** : Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu** : Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat** : Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Wonomerto

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Wonomerto adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

**Tabel 2.6**

**Isu Strategis Kecamatan Wonomerto**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti kawasan pegunungan | Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br><br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br><br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, serta kehutanan | Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

***Sumber Data : Kecamatan Wonomerto***

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonomerto Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Wonomerto Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonomerto, dalam hal ini Kecamatan Wonomerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui

pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Wonomerto Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

**Gambar 3.1**

**Konsep Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo**

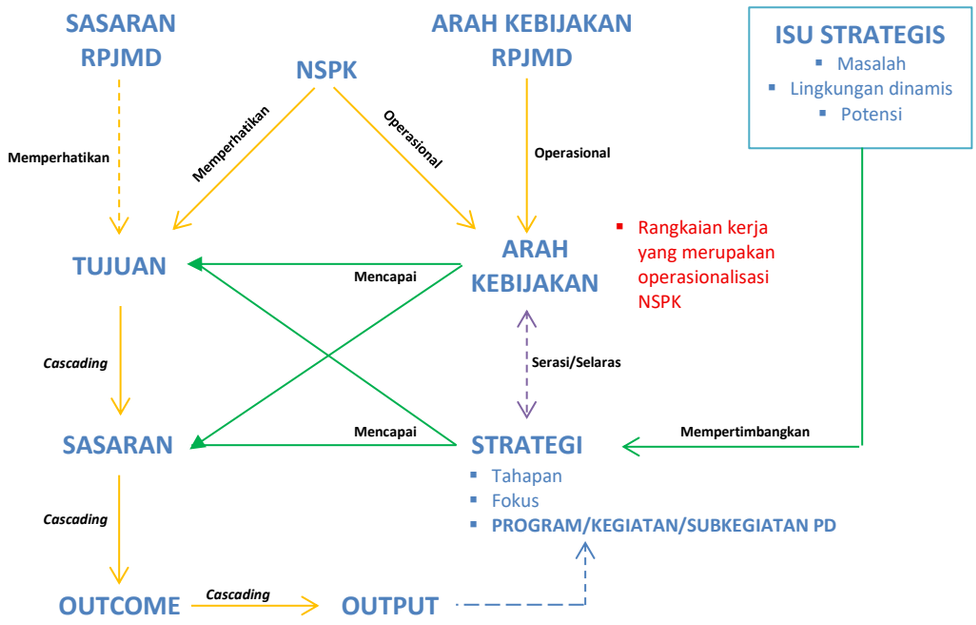


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan

Wonomerto Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.2**

**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**

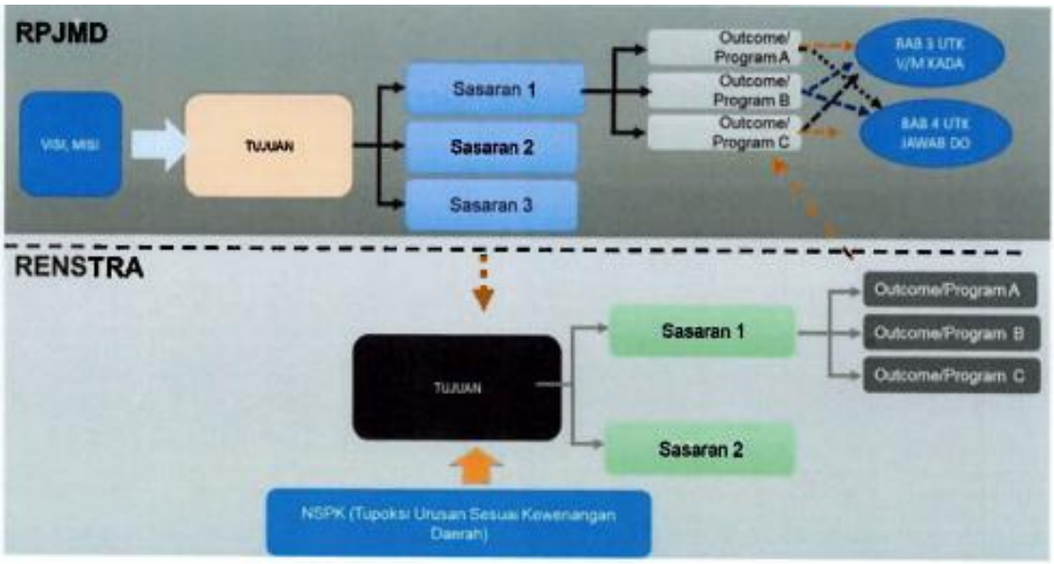


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.1**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonomerto**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wonomerto** | | | | | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkanya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 87,66 | 88,54 | 89,42 | 90,32 | 91,22 | 92,13 | 93,05 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, diperlukan Misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus

dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wonomerto

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

**Tabel 3.1.2**

**Definisi Operasional IKU Kecamatan Wonomerto**

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut :<br>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | |
| 3. | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai hasil atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1) ——————————— X 100<br>Nilai LHE AKIP tahun (n-1)<br><br>Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Wonomerto***

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Wonomerto dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Wonomerto dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk

meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

## B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Wonomerto

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Wonomerto dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Kecamatan Wonomerto**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

***Sumber Data : Kecamatan Wonomerto***

## C. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Wonomerto

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Wonomerto sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Wonomerto :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Wonomerto dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Wonomerto, sebagai berikut

**Tabel 3.3**

**Arah Kebijakan Kecamatan Wonomerto**

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul; | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

***Sumber Data : Kecamatan Wonomerto***

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahun, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman,

ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

## Tabel 4.1

## Program Kecamatan Wonomerto

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.603.338.254,57 | | 2.632.269.949,01 | | 2.671.499.222,83 | | 2.726.009.768,32 | | 2.789.931.705,64 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.454.416.254,57 | | 2.481.692.933,69 | | 2.518.678.126,65 | | 2.570.070.438,26 | | 2.630.335.768,27 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 70.75 | 70.79 | 70.82 | 2.454.416.254,57 | 70.86 | 2.481.692.933,69 | 70.89 | 2.518.678.126,65 | 70.93 | 2.570.070.438,26 | 70.96 | 2.630.335.768,27 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 12.400.000,00 | | 12.537.805,00 | | 12.724.658,55 | | 12.984.298,56 | | 13.288.766,10 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 12.400.000,00 | 100 | 12.537.805,00 | 100 | 12.724.658,55 | 100 | 12.984.298,56 | 100 | 13.288.766,10 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 50.800.000,00 | | 51.364.555,95 | | 52.130.052,62 | | 53.193.738,87 | | 54.441.073,87 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 50.800.000,00 | 100 | 51.364.555,95 | 100 | 52.130.052,62 | 100 | 53.193.738,87 | 100 | 54.441.073,87 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 27.722.000,00 | | 28.030.083,07 | | 28.447.821,31 | | 29.028.284,24 | | 29.708.965,64 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 27.722.000,00 | 100 | 28.030.083,07 | 100 | 28.447.821,31 | 100 | 29.028.284,24 | 100 | 29.708.965,64 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 50.000.000,00 | | 50.555.665,30 | | 51.309.107,04 | | 52.356.042,57 | | 53.583.734,28 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang | 100 | 100 | 100 | 50.000.000,00 | 100 | 50.555.665,30 | 100 | 51.309.107,04 | 100 | 52.356.042,57 | 100 | 53.583.734,28 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terlaksana Dengan Baik (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 8.000.000,00 | | 8.088.906,00 | | 8.209.456,66 | | 8.376.965,82 | | 8.573.397,48 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 8.000.000,00 | 100 | 8.088.906,00 | 100 | 8.209.456,66 | 100 | 8.376.965,82 | 100 | 8.573.397,48 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2.603.338.254,57 | | 2.632.269.949,01 | | 2.671.499.222,83 | | 2.726.009.768,32 | | 2.789.931.705,64 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 4.1**

**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan**

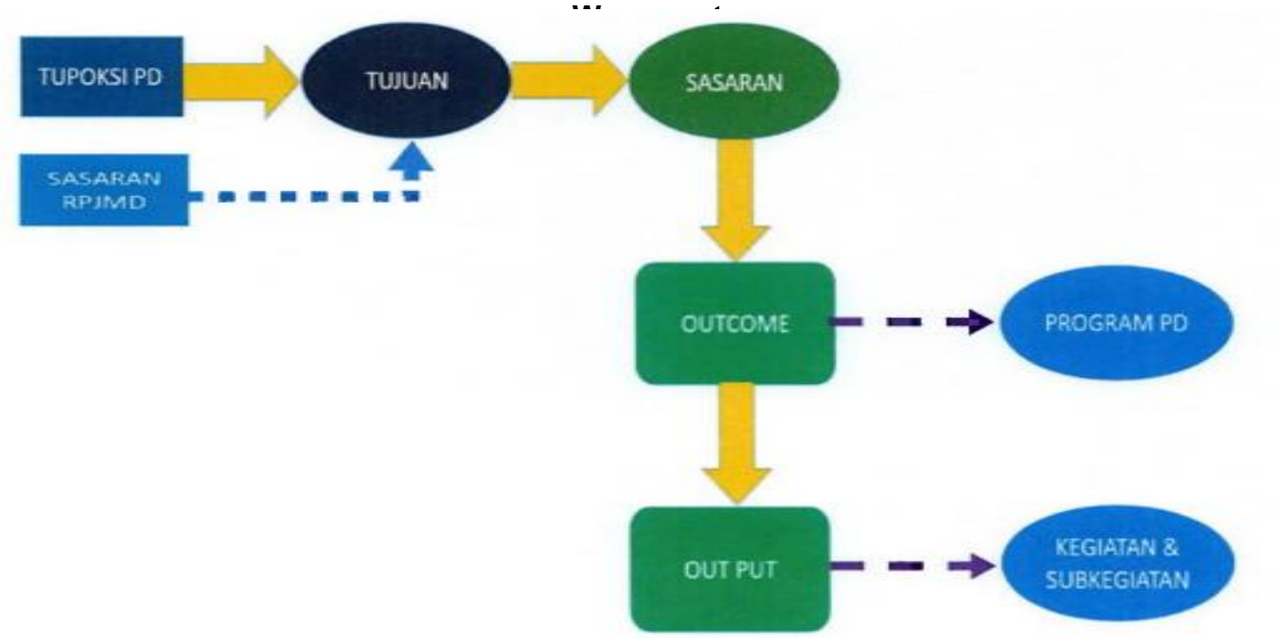

## Tabel 4.2

## Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Wonomerto

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wonomerto** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkanya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prosentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | |
| | | | | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2.1**

**Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Wonomerto**

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Wonomerto***

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Wonomerto**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.603.338.254,57 | | 2.632.269.949,45 | | 2.671.499.223,43 | | 2.726.009.769,69 | | 2.789.931.705,81 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.454.416.254,57 | | 2.481.692.933,69 | | 2.518.678.126,65 | | 2.570.070.438,26 | | 2.630.335.768,27 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 70,75 | 70,82 | 2.454.416.254,57 | 70,86 | 2.481.692.933,69 | 70,89 | 2.518.678.126,65 | 70,93 | 2.570.070.438,26 | 70,96 | 2.630.335.768,27 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wonomerto | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.600.000 | | 1.617.760 | | 1.641.864,62 | | 1.675.358,66 | | 1.714.562,05 | | |
| Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | 20 | 1.600.000 | 20 | 1.617.760 | 20 | 1.641.864,62 | 20 | 1.675.358,66 | 20 | 1.714.562,05 | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1.000.000 | | 1.011.100 | | 1.026.165,39 | | 1.047.099,16 | | 1.071.601,28 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | 8 | 1.000.000 | 8 | 1.011.100 | 8 | 1.026.165,39 | 8 | 1.047.099,16 | 8 | 1.071.601,28 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 600.000 | | 606.660 | | 615.699,23 | | 628.259,5 | | 642.960,77 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | 20 | 600.000 | 20 | 606.660 | 20 | 615.699,23 | 20 | 628.259,5 | 20 | 642.960,77 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.178.699.366,57 | | 2.202.917.568,23 | | 2.235.741.041,03 | | 2.281.350.158,25 | | 2.334.733.751,95 | | |
| Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | 48 | 2.178.699.366,57 | 48 | 2.202.917.568,23 | 48 | 2.235.741.041,03 | 48 | 2.281.350.158,25 | 48 | 2.334.733.751,95 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 23 | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.166.891.366,57 | | 2.190.978.499,43 | | 2.223.624.080,11 | | 2.268.986.011,31 | | 2.322.080.283,99 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 23 | 23 | 2.166.891.366,57 | 23 | 2.190.978.499,43 | 23 | 2.223.624.080,11 | 23 | 2.268.986.011,31 | 23 | 2.322.080.283,99 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 10.208.000 | | 10.321.308,8 | | 10.475.096,3 | | 10.688.788,27 | | 10.938.905,91 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 10.208.000 | 12 | 10.321.308,8 | 12 | 10.475.096,3 | 12 | 10.688.788,27 | 12 | 10.938.905,91 | | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 400.000 | | 404.440 | | 410.466,16 | | 418.839,67 | | 428.640,51 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | 5 | 400.000 | 5 | 404.440 | 5 | 410.466,16 | 5 | 418.839,67 | 5 | 428.640,51 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 600.000 | | 606.660 | | 615.699,23 | | 628.259,5 | | 642.960,77 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | 48 | 600.000 | 48 | 606.660 | 48 | 615.699,23 | 48 | 628.259,5 | 48 | 642.960,77 | | |
| 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 600.000 | | 606.660 | | 615.699,23 | | 628.259,5 | | 642.960,77 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | 1 | 600.000 | 1 | 606.660 | 1 | 615.699,23 | 1 | 628.259,5 | 1 | 642.960,77 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 44.981.900 | | 45.481.200,09 | | 46.158.868,95 | | 47.100.509,88 | | 48.202.661,81 | | |
| Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 44.981.900 | 12 | 45.481.200,09 | 12 | 46.158.868,95 | 12 | 47.100.509,88 | 12 | 48.202.661,81 | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.200.800 | | 3.236.329,88 | | 3.284.550,18 | | 3.351.555 | | 3.429.981,39 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 3.200.800 | 12 | 3.236.329,88 | 12 | 3.284.550,18 | 12 | 3.351.555 | 12 | 3.429.981,39 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 2.117.200 | | 2.140.700,92 | | 2.172.597,36 | | 2.216.918,35 | | 2.268.794,24 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 4 | 2.117.200 | 4 | 2.140.700,92 | 4 | 2.172.597,36 | 4 | 2.216.918,35 | 4 | 2.268.794,24 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 35.910.000 | | 36.308.601 | | 36.849.599,15 | | 37.601.330,98 | | 38.481.202,12 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 35.910.000 | 4 | 36.308.601 | 4 | 36.849.599,15 | 4 | 37.601.330,98 | 4 | 38.481.202,12 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 3.753.900 | | 3.795.568,29 | | 3.852.122,26 | | 3.930.705,55 | | 4.022.684,06 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 3.753.900 | 12 | 3.795.568,29 | 12 | 3.852.122,26 | 12 | 3.930.705,55 | 12 | 4.022.684,06 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 196.214.988 | | 198.392.974,37 | | 201.349.029,68 | | 205.456.549,89 | | 210.264.233,17 | | |
| Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 196.214.988 | 12 | 198.392.974,37 | 12 | 201.349.029,68 | 12 | 205.456.549,89 | 12 | 210.264.233,17 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 23.142.264 | | 23.399.143,13 | | 23.747.790,36 | | 24.232.245,29 | | 24.799.279,83 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 23.142.264 | 12 | 23.399.143,13 | 12 | 23.747.790,36 | 12 | 24.232.245,29 | 12 | 24.799.279,83 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.268.100 | | 7.348.775,91 | | 7.458.272,67 | | 7.610.421,43 | | 7.788.505,3 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 7.268.100 | 1 | 7.348.775,91 | 1 | 7.458.272,67 | 1 | 7.610.421,43 | 1 | 7.788.505,3 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 165.804.624 | | 167.645.055,33 | | 170.142.966,65 | | 173.613.883,17 | | 177.676.448,04 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 165.804.624 | 12 | 167.645.055,33 | 12 | 170.142.966,65 | 12 | 173.613.883,17 | 12 | 177.676.448,04 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 32.920.000 | | 33.283.431 | | 33.787.322,37 | | 34.487.861,58 | | 35.420.559,29 | | |
| Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 19 | 32.920.000 | 19 | 33.283.431 | 19 | 33.787.322,37 | 19 | 34.487.861,58 | 19 | 35.420.559,29 | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 24.800.000 | | 25.075.280 | | 25.448.901,67 | | 25.968.059,27 | | 26.575.711,85 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 8 | 24.800.000 | 8 | 25.075.280 | 8 | 25.448.901,67 | 8 | 25.968.059,27 | 8 | 26.575.711,85 | | |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 8.120.000 | | 8.208.151 | | 8.338.420,7 | | 8.519.802,31 | | 8.844.847,44 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 19 | 8.120.000 | 19 | 8.208.151 | 19 | 8.338.420,7 | 19 | 8.519.802,31 | 19 | 8.844.847,44 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 12.400.000 | | 12.537.805 | | 12.724.658,55 | | 12.984.298,56 | | 13.288.766,1 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 12.400.000 | 100 | 12.537.805 | 100 | 12.724.658,55 | 100 | 12.984.298,56 | 100 | 13.288.766,1 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wonomerto | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 9.200.000 | | 9.302.285 | | 9.440.889,05 | | 9.633.483,18 | | 9.858.906,69 | | |
| Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 6 | 9 | 9.200.000 | 9 | 9.302.285 | 9 | 9.440.889,05 | 9 | 9.633.483,18 | 9 | 9.858.906,69 | | |
| | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 9.200.000 | | 9.302.285 | | 9.440.889,05 | | 9.633.483,18 | | 9.858.906,69 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 6 | 9 | 9.200.000 | 9 | 9.302.285 | 9 | 9.440.889,05 | 9 | 9.633.483,18 | 9 | 9.858.906,69 | | |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 3.200.000 | | 3.235.520 | | 3.283.769,5 | | 3.350.815,38 | | 3.429.859,41 | | |
| Prosentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 4 | 4 | 3.200.000 | 4 | 3.235.520 | 4 | 3.283.769,5 | 4 | 3.350.815,38 | 4 | 3.429.859,41 | | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | 3.200.000 | | 3.235.520 | | 3.283.769,5 | | 3.350.815,38 | | 3.429.859,41 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 4 | 4 | 3.200.000 | 4 | 3.235.520 | 4 | 3.283.769,5 | 4 | 3.350.815,38 | 4 | 3.429.859,41 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 50.800.000 | | 51.364.555,95 | | 52.130.052,76 | | 53.193.739,25 | | 54.441.074,04 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 50.800.000 | 100 | 51.364.555,95 | 100 | 52.130.052,76 | 100 | 53.193.739,25 | 100 | 54.441.074,04 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wonomerto | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 46.800.000 | | 47.319.480 | | 48.024.540,25 | | 49.004.240,87 | | 50.150.940,11 | | |
| Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 46.800.000 | 3 | 47.319.480 | 3 | 48.024.540,25 | 3 | 49.004.240,87 | 3 | 50.150.940,11 | | |
| | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 12 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 5.400.000 | | 5.459.940 | | 5.541.293,25 | | 5.654.335,87 | | 5.786.647,11 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 12 | 8 | 5.400.000 | 8 | 5.459.940 | 8 | 5.541.293,25 | 8 | 5.654.335,87 | 8 | 5.786.647,11 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 41.400.000 | | 41.859.540 | | 42.483.247 | | 43.349.905 | | 44.364.293 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 41.400.000 | 3 | 41.859.540 | 3 | 42.483.247 | 3 | 43.349.905 | 3 | 44.364.293 | | |
| 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 4.000.000 | | 4.045.075,95 | | 4.105.512,51 | | 4.189.498,38 | | 4.290.133,93 | | |
| Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 80 | 350 | 4.000.000 | 350 | 4.045.075,95 | 350 | 4.105.512,51 | | 4.189.498,38 | | 4.290.133,93 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 70 | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 2.000.000 | | 2.022.200 | | 2.052.330,78 | | 2.094.198,33 | | 2.143.202,57 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 70 | 350 | 2.000.000 | 350 | 2.022.200 | 350 | 2.052.330,78 | 350 | 2.094.198,33 | 350 | 2.143.202,57 | | |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 2.000.000 | | 2.022.875,95 | | 2.053.181,73 | | 2.095.300,05 | | 2.146.931,36 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 80 | 350 | 2.000.000 | 350 | 2.022.875,95 | 350 | 2.053.181,73 | | 2.095.300,05 | | 2.146.931,36 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 27.722.000 | | 28.030.083,07 | | 28.447.821,31 | | 29.028.284,24 | | 29.708.965,64 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 27.722.000 | 100 | 28.030.083,07 | 100 | 28.447.821,31 | 100 | 29.028.284,24 | 100 | 29.708.965,64 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wonomerto | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 27.722.000 | | 28.030.083,07 | | 28.447.821,31 | | 29.028.284,24 | | 29.708.965,64 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | 27.722.000 | | 28.030.083,07 | | 28.447.821,31 | | 29.028.284,24 | | 29.708.965,64 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 27.722.000 | | 28.030.083,07 | | 28.447.821,31 | | 29.028.284,24 | | 29.708.965,64 | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 14 | 27.722.000 | 14 | 28.030.083,07 | 14 | 28.447.821,31 | 14 | 29.028.284,24 | 14 | 29.708.965,64 | |
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 50.000.000 | | 50.555.665,3 | | 51.309.107,04 | | 52.356.042,57 | | 53.583.734,28 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.555.665,3 | 100 | 51.309.107,04 | 100 | 52.356.042,57 | 100 | 53.583.734,28 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wonomerto | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 50.000.000 | | 50.555.665,3 | | 51.309.107,04 | | 52.356.042,57 | | 53.583.734,28 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 35 | 1.372 | 50.000.000 | 1.372 | 50.555.665,3 | 1.372 | 51.309.107,04 | 1.372 | 52.356.042,57 | 1.372 | 53.583.734,28 | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 50.000.000 | | 50.555.665,3 | | 51.309.107,04 | | 52.356.042,57 | | 53.583.734,28 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 35 | 1.372 | 50.000.000 | 1.372 | 50.555.665,3 | 1.372 | 51.309.107,04 | 1.372 | 52.356.042,57 | 1.372 | 53.583.734,28 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 8.000.000 | | 8.088.906,44 | | 8.209.457,12 | | 8.376.966,81 | | 8.573.397,48 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.088.906,44 | 100 | 8.209.457,12 | 100 | 8.376.966,81 | 100 | 8.573.397,48 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wonomerto | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 8.000.000 | | 8.088.906,44 | | 8.209.457,12 | | 8.376.966,81 | | 8.573.397,48 | | |
| Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.088.906,44 | 0 | 8.209.457,12 | 0 | 8.376.966,81 | 0 | 8.573.397,48 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 18 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 18 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | 4.000.000 | | 4.044.400 | | 4.120.056,66 | | 4.204.105,82 | | 4.250.771,38 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 18 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.044.400 | 2 | 4.120.056,66 | 2 | 4.204.105,82 | 2 | 4.250.771,38 | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 4.000.000 | | 4.044.506,44 | | 4.089.400,46 | | 4.172.860,99 | | 4.322.626,1 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 18 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.044.506,44 | 2 | 4.089.400,46 | 2 | 4.172.860,99 | 2 | 4.322.626,1 | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas. Penetapannya berlandaskan pada isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kemampuan pendanaan daerah. Secara eksplisit, Program Prioritas Kecamatan Wonomerto dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wonomerto** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | SAE KERJA |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wonomerto sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wonomerto**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Wonomerto | | | | | | | | | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 91,00 | |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 87,66 | 88,54 | 89,42 | 90,32 | 91,22 | 92,13 | 93,05 | |
| 3. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Wonomerto sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Wonomerto**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | | | | | | | | | | |
| | **NIHIL** | | | | | | | | | | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Wonomerto.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Wonomerto.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Wonomerto bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Wonomerto.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Wonomerto. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;

2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;
3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

Probolinggo, 20 September 2025

Plt.CAMAT WONOMERTO
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN WONOMERTO

**RASYIDHI.S.Sos.M.M**
Pembina
NIP. 19730506 199602 1 003

# RENCANA STRATEGIS

# (RENSTRA)

# KECAMATAN SUKAPURA

# TAHUN 2025-2029

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KECAMATAN SUKAPURA**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukapura Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Sukapura Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Sukapura. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Sukapura. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Sukapura dengan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan semoga Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Sukapura, 24 September 2025

CAMAT SUKAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN SUKAPURA

**Drs. SAIFUL HIDAYAT, M.M.**
Pembina Tingkat I
NIP. 1967 1030 199302 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 6
1.4 Sistematika Penulisan ..... 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukapura ..... 10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukapura ..... 17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukapura ..... 21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 27
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Sukapura ..... 27
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Sukapura ..... 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sukapura Tahun 2025-2029 ..... 32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sukapura dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 40
4.1 Uraian Program ..... 40
4.2 Uraian Kegiatan ..... 44
BAB V PENUTUP ..... 79
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 79
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 80

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..…….…..… 18
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ……..…… 19
Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..... 19
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ……. 22
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo (2020-2024) …… 23
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Sukapura ……..… 30
Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 …….. 35
Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Sukapura …… 36
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Sukapura ……..... 38
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Sukapura …… 33
Tabel 4.1 Program Kecamatan Sukapura ……. 42
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sukapura ……. 45
Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Sukapura …….. 58
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sukapura ……. 61
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …… 77
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukapura …….. 78
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sukapura …… 78

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sukapura ..... 17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo ..... 33
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah ..... 34
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sukapura ..... 45

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Sukapura menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukapura setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Sukapura juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Sukapura. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Sukapura berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan Urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Sukapura terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukapura yang disusun pada periode Tahun 2025–2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Sukapura untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Sukapura berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Sukapura dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Sukapura disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Sukapura akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Sukapura dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Sukapura untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Sukapura berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan

Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta pembangunan wilayah melalui perencanaan sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan;
1.4 Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKAPURA**

Bab II memuat:

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukapura;
2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukapura;
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukapura;
2.4 Kelompok Sasaran Layanan;
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Sukapura;
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sukapura.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat:

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sukapura Tahun 2025–2029;
3.2 Strategi dan Arah kebijakan Kecamatan Sukapura dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029.

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub. Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub. Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sukapura 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukapura; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukapura

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Sukapura Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut:

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana,

pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
   b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
   c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan

keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;

d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi:
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil,

pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Sukapura**

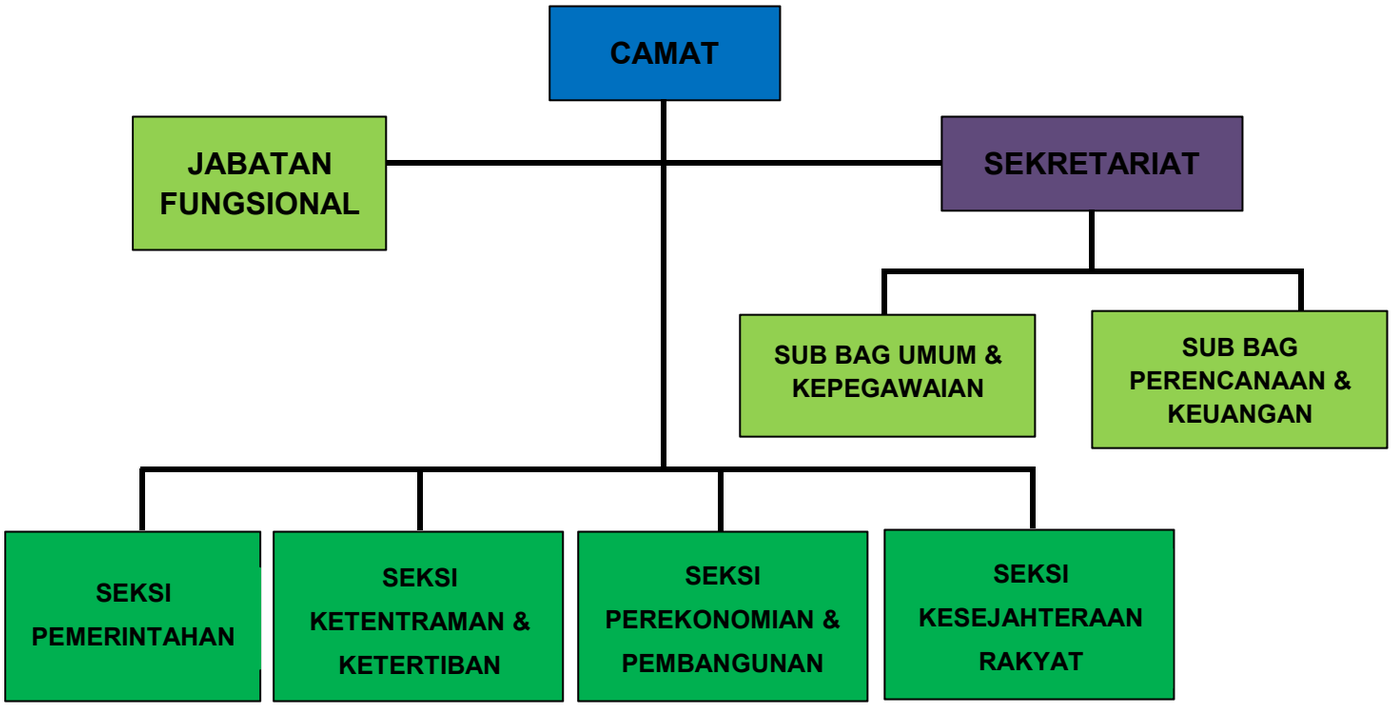


Struktur Organisasi Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan membawahi:
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukapura

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Sukapura.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Sukapura sebanyak 23 orang dengan rincian: **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 15 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 2 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 4 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Sukapura berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | **5** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | **3** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | **3** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| 10. | Honorer | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | **4** |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **3** | **1** | **13** | **4** | **18** | **3** | **21** |

*Sumber data Kecamatan Sukapura*

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jabatan sebagai berikut:

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | **18** | 1 | 5 | 9 | 3 | **18** |
| 2. | Perempuan | - | 1 | - | - | 1 | 1 | **3** | - | - | 2 | 1 | **3** |
| **Jumlah** | | **-** | **7** | **6** | **2** | **2** | **4** | **21** | **1** | **5** | **11** | **4** | **21** |

*Sumber data Kecamatan Sukapura*

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.3

Jumlah Sarana Prasarana

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak Berat (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lain-lain Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Lain-lain tugu/tanda batas | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Portable Generating Set | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Genset | - | - | 0 |
| 10 | Kursi Kerja | 17 | 16 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kursi Lipat | 15 | 13 | 2 |
| 12 | P.C Unit | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Sepeda Motor | 10 | 8 | 2 |
| 15 | Sport Utility Vehicle (SUV) | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Mesin Fotocopy Double Folio | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lemari Besi/Metal | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lemari Kayu | 4 | 0 | 4 |
| 19 | Filing Cabinet Besi | 6 | 5 | 1 |
| 20 | Brandkas | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Lemari Kaca | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alat Penghancur Kertas | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mesin Absensi | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Papan Pengumuman | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Meja Kerja Kayu | 20 | 15 | 5 |
| 26 | Kursi Besi/Metal | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Meja Rapat | 4 | 3 | 1 |
| 28 | Meja Resepsionis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Meja 1/2 Biro | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kasur/Spring Bed | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kursi Rapat | 65 | 55 | 10 |
| 32 | Kursi Tamu | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Bangku Tunggu | 2 | 2 | 0 |
| 34 | Filling Besi/Metal | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lemari Es | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Televisi | 3 | 3 | 0 |
| 37 | Sound System | 2 | 2 | 0 |
| 38 | Mimbar/Podium | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Karpet | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Gordyin/Kray | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Mesin Pompa Air | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Meja Tamu Biasa | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 7 | 5 | 2 |
| 46 | Layar Film/Projector | 2 | 1 | 1 |
| 47 | Wireless Amplifier | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Antene SHF Portable | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Lap Top | 7 | 5 | 2 |
| 50 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 2 | 2 | 0 |
| 51 | External/ Portable Hardisk | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Hard disk Eksternal | 2 | 0 | 2 |
| 53 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1 | 0 | 1 |

*Sumber data Kecamatan Sukapura*

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukapura

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukapura yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Sukapura telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Sukapura dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024-2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025-2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025-2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

Target dan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.1 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 97,70 | 85,30 | 97,49 | - | - | 97,70 | 85,30 | 97,49 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 96,10 | 100 | 96,16 | - | - | 96,10 | 100,00 | 96,16 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 92,70 | 100 | 97,08 | - | - | 92,70 | 100,00 | 97,08 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 95,71 | - | - | - | - | 95,71 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 | 58,58 | 65,55 | 67,56 | 68,51 | 71,36 | 73,23 | 81,94 | 84,45 | 85,64 | 96,43 |

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut:

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | **2.776.265.496,00** | **2.524.725.792,00** | **2.814.872.419,00** | **-** | **-** | **2.579.938.744,00** | **2.422.059.014,00** | **2.551.801.996,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **92,93** | **95,93** | **90,65** | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.376.400,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | - | - | 7.376.400,00 | 790.000,00 | 760.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 98,75 | 95,00 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 5.260.000,00 | - | - | | | 5.260.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | 409.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | | | 409.000,00 | 390.000,00 | 760.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 97,50 | 95,00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | 418.000,00 | - | - | | | 418.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | 430.000,00 | 400.000,00 | - | | | 430.000,00 | 400.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | 430.000,00 | - | - | | | 430.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | - | - | - | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 429.400,00 | - | - | | | 429.400,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.493.163.581,00 | 2.337.613.392,00 | 2.492.090.983,00 | - | - | 2.309.204.547,00 | 2.247.114.238,00 | 2.240.976.150,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92,62 | 96,13 | 89,92 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | 2.331.685.285,00 | 2.167.520.096,00 | 2.472.459.983,00 | - | - | 2.148.998.379,00 | 2.077.839.310,00 | 2.221.396.150,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92,17 | 95,86 | 89,85 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | 160.618.296,00 | 170.093.296,00 | 18.600.000,00 | - | - | 159.346.168,00 | 169.274.928,00 | 18.600.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,21 | 99,52 | 100,00 | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | 430.000,00 | - | 1.031.000,00 | - | - | 430.000,00 | - | 980.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | 95,05 | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | - | 430.000,00 | - | - | - | - | 430.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | - | - | 3.400.000,00 | - | - | - | - | 3.315.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,51 | | |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - | - | - | - | 2.400.000,00 | - | - | - | - | 2.328.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,00 | | |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - | - | - | - | 1.000.000,00 | - | - | - | - | 987.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,75 | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 154.574.900,00 | 88.017.700,00 | 112.522.998,00 | - | - | 150.132.400,00 | 87.041.150,00 | 103.995.036,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,13 | 98,89 | 92,42 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 99,94 | 99,27 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantor | - | - | 3.797.200,00 | 1.693.000,00 | 8.950.000,00 | - | - | 3.797.200,00 | 1.692.000,00 | 8.885.000,00 | | | | | | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 64.683.700,00 | 19.189.100,00 | 12.954.202,00 | - | - | 64.683.700,00 | 19.110.600,00 | 12.760.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 99,59 | 98,50 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | 1.979.500,00 | 2.241.900,00 | 2.868.296,00 | - | - | 1.979.500,00 | 2.239.550,00 | 2.810.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 99,90 | 97,99 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | - | 18.600.000,00 | 20.000.000,00 | 20.947.500,00 | - | - | 18.575.000,00 | 19.990.400,00 | 20.148.736,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,87 | 99,95 | 96,19 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | - | 17.726.100,00 | 8.364.000,00 | 10.955.000,00 | - | - | 17.725.950,00 | 7.552.000,00 | 6.182.400,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 90,29 | 56,43 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | 4.506.400,00 | 1.989.700,00 | 2.016.000,00 | - | - | 4.455.000,00 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,86 | 99,51 | 98,21 | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | 43.282.000,00 | 34.540.000,00 | 53.832.000,00 | - | - | 38.916.050,00 | 34.476.600,00 | 51.228.400,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 89,91 | 99,82 | 95,16 | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | 19.954.000,00 | 28.397.000,00 | - | - | - | 19.925.000,00 | 27.850.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,85 | 98,07 | | |
| Pengadaan Mebel | - | - | - | - | 4.693.000,00 | - | - | - | - | 4.500.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95,89 | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | - | 19.954.000,00 | 23.704.000,00 | - | - | - | 19.925.000,00 | 23.350.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,85 | 98,51 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 118.350.615,00 | 69.748.700,00 | 152.321.438,00 | - | - | 110.971.397,00 | 59.634.826,00 | 150.620.010,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,76 | 85,50 | 98,88 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | 1.176.900,00 | 1.000.000,00 | 680.000,00 | - | - | 1.176.900,00 | 1.000.000,00 | 680.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | 30.418.615,00 | 36.140.500,00 | 15.263.388,00 | | - | 24.249.497,00 | 28.900.326,00 | 14.699.130,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 79,72 | 79,97 | 96,30 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 60.755.100,00 | 25.108.200,00 | 8.000.010,00 | | - | 59.545.000,00 | 22.234.500,00 | 7.776.300,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,01 | 88,55 | 97,20 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | 26.000.000,00 | 7.500.000,00 | 128.378.040,00 | | - | 26.000.000,00 | 7.500.000,00 | 127.464.580,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 | 99,29 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.800.000,00 | 8.592.000,00 | 25.340.000,00 | - | - | 2.254.000,00 | 7.553.800,00 | 24.285.300,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80,50 | 87,92 | 95,84 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | 2.800.000,00 | 3.600.000,00 | 2.500.000,00 | | - | 2.254.000,00 | 2.603.800,00 | 2.460.300,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80,50 | 72,33 | 98,41 | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | - | - | 2.840.000,00 | | - | - | - | 2.825.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,47 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | - | 4.992.000,00 | 20.000.000,00 | | - | - | 4.950.000,00 | 19.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,16 | 95,00 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | **64.270.000,00** | **64.824.800,00** | **59.375.000,00** | **-** | **-** | **63.469.900,00** | **60.960.000,00** | **52.601.500,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **98,76** | **94,04** | **88,59** | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 52.920.000,00 | 41.136.800,00 | 39.655.000,00 | - | - | 52.119.900,00 | 38.979.000,00 | 35.161.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,49 | 94,75 | 88,67 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | - | 41.320.000,00 | 41.136.800,00 | 39.655.000,00 | - | - | 40.519.900,00 | 38.979.000,00 | 35.161.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,06 | 94,75 | 88,67 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 11.600.000,00 | - | - | - | - | 11.600.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 11.350.000,00 | 23.688.000,00 | 19.720.000,00 | - | - | 11.350.000,00 | 21.981.000,00 | 17.440.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 92,79 | 88,44 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | - | - | - | 23.688.000,00 | 19.720.000,00 | - | - | - | 21.981.000,00 | 17.440.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 92,79 | 88,44 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | - | - | 8.150.000,00 | - | - | - | - | 8.150.000,00 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | - | 3.200.000,00 | - | | - | - | 3.200.000,00 | - | | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | **109.360.000,00** | **273.435.100,00** | **44.250.000,00** | **-** | **-** | **98.760.000,00** | **247.293.500,00** | **40.371.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **90,31** | **90,44** | **91,23** | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 109.360.000,00 | 223.435.100,00 | 44.250.000,00 | - | - | 98.760.000,00 | 197.847.500,00 | 40.371.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90,31 | 88,55 | 91,23 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | 9.060.000,00 | 10.753.900,00 | 24.530.000,00 | - | - | 9.060.000,00 | 10.173.300,00 | 22.152.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 94,60 | 90,31 | | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | - | 100.300.000,00 | 199.750.000,00 | 19.720.000,00 | - | - | 89.700.000,00 | 174.867.200,00 | 18.219.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 89,43 | 87,54 | 92,39 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | - | - | 12.931.200,00 | - | - | - | - | 12.807.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,04 | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 49.446.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,89 | #DIV/0! | | |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 49.446.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,89 | #DIV/0! | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | **46.848.800,00** | **58.791.900,00** | **78.582.000,00** | **-** | **-** | **45.648.800,00** | **58.697.600,00** | **77.446.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **97,44** | **99,84** | **98,55** | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 46.848.800,00 | 58.791.900,00 | 78.582.000,00 | - | - | 45.648.800,00 | 58.697.600,00 | 77.446.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,44 | 99,84 | 98,55 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | 45.048.800,00 | 50.791.900,00 | 78.582.000,00 | - | - | 43.848.800,00 | 50.727.600,00 | 77.446.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,34 | 99,87 | 98,55 | | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | 1.800.000,00 | 8.000.000,00 | - | - | - | 1.800.000,00 | 7.970.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 99,63 | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | **50.879.000,00** | **29.210.800,00** | **49.470.000,00** | **-** | **-** | **50.479.000,00** | **29.116.000,00** | **47.924.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **99,21** | **99,68** | **96,87** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 50.879.000,00 | 29.210.800,00 | 49.470.000,00 | - | - | 50.479.000,00 | 29.116.000,00 | 47.924.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,21 | 99,68 | 96,87 | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | - | 50.879.000,00 | 29.210.800,00 | 49.470.000,00 | - | - | 50.479.000,00 | 29.116.000,00 | 47.924.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,21 | 99,68 | 96,87 | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18.800.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14.587.500,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **77,59** | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | - | - | 18.800.000,00 | - | - | - | - | 14.587.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 77,59 | | |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | - | - | - | 2.400.000,00 | - | - | - | - | 2.340.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,50 | | |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | - | - | - | 11.200.000,00 | - | - | - | - | 10.075.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 89,96 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | - | - | - | 5.200.000,00 | - | - | - | - | 2.172.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 41,78 | | |
| **Jumlah** | **-** | **-** | **3.047.623.296,00** | **2.950.988.392,00** | **3.065.349.419,00** | **-** | **-** | **2.838.296.444,00** | **2.818.126.114,00** | **2.784.731.996,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **93,13** | **95,50** | **90,85** | | |

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaranwilayah Kecamatan Sukapura:

1. Masyarakat Umum - Warga yang tinggal di Kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukapura

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan:

- **Keterbatasan Sumber Daya**: Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur**: Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.
- **Birokrasi yang Kaku**: Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.

- **Akses dan Kesenjangan Digital**: Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah**: Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik:

- **Pemanfaatan Teknologi Digital**: Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar Sektor**: Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur**: Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu**: Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat**: Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sukapura

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya:

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Sukapura adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

Tabel 2.6

Isu Strategis Kecamatan Sukapura

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti kawasan pegunungan | Belum optimalnya penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br><br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal untuk kesejahteraan dan konservasi | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br><br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, serta kehutanan | Masih tingginya angka kemiskinan dan ketergantungan | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

*Sumber data Kecamatan Sukapura*

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sukapura Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Sukapura Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu: ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukapura, dalam hal ini Kecamatan Sukapura diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Sukapura Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu:

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1

Konsep Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

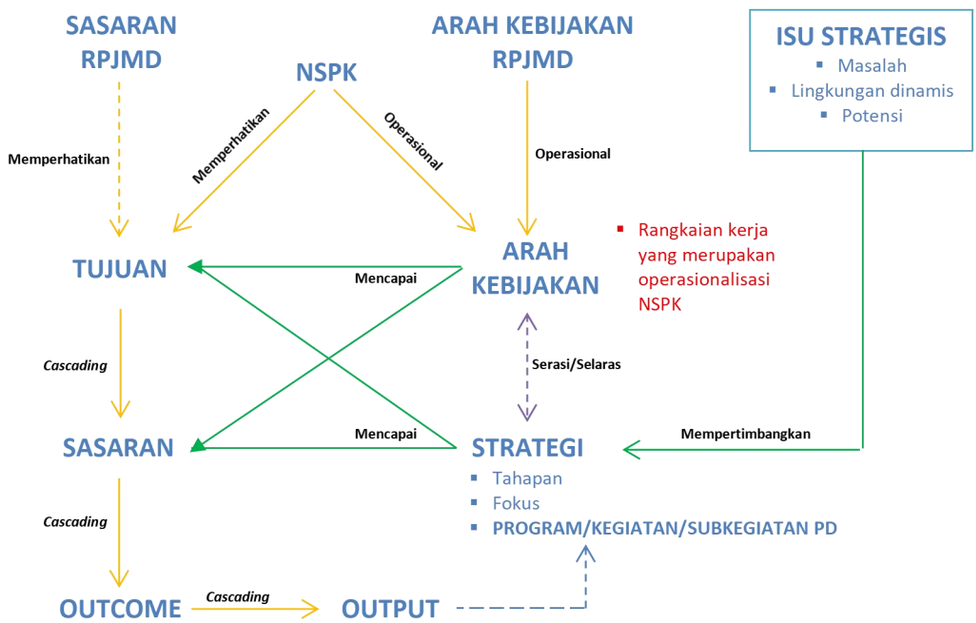


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

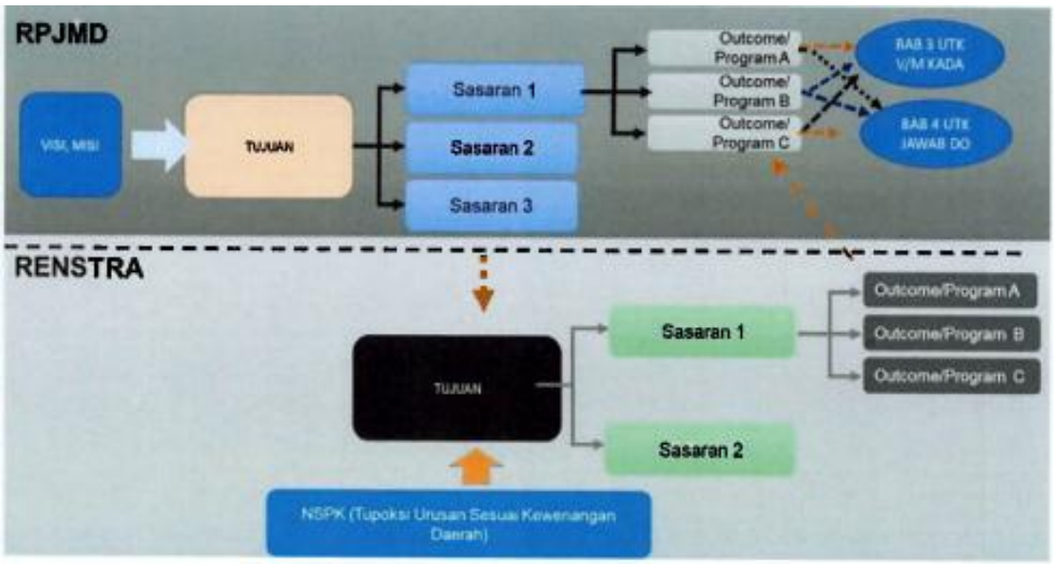


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sukapura

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Sukapura** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 85,41 | 86,26 | 87,13 | 88,00 | 88,88 | 89,77 | 90,66 | |

*Sumber data SIPD Renstra*

Keterangan: SIPD

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, diperlukan Misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan

daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukapura

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

Tabel 3.1.2

Definisi Operasional IKU Kecamatan Sukapura

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut :<br>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| 3. | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat | Nilai hasil atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan | $\frac{\text{Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1)}}{\text{Nilai LHE AKIP tahun (n-1)}} \times 100$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Daerah | (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

*Sumber data Cascading Kecamatan Sukapura*

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sukapura dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Sukapura dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan

## B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Sukapura

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Sukapura dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Kecamatan Sukapura

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

*Sumber data Kecamatan Sukapura*

## C. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Sukapura

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Sukapura sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Sukapura:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Sukapura dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Sukapura, sebagai berikut:

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Kecamatan Sukapura

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | 1. Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul. | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

*Sumber data Kecamatan Sukapura*

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

   Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

c. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahun, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

d. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman,

ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

## Tabel 4.1

## Program Kecamatan Sukapura

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.819.866.330 | | 2.851.204.367,66 | | 2.893.696.467,43 | | 2.952.740.832,41 | | 3.021.979.363,02 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.725.916.430 | | 2.756.210.373,67 | | 2.797.286.757,91 | | 2.854.363.933,12 | | 2.921.295.633,46 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 100 | 100 | 100 | 2.725.916.430 | 100 | 2.756.210.373,67 | 100 | 2.797.286.757,91 | 100 | 2.854.363.933,12 | 100 | 2.921.295.633,46 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 10.341.500 | | 10.456.428,25 | | 10.612.262,61 | | 10.828.800,29 | | 11.082.723,76 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 10.341.500 | 100 | 10.456.428,25 | 100 | 10.612.262,61 | 100 | 10.828.800,29 | 100 | 11.082.723,76 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 8.207.000 | | 8.298.206,9 | | 8.421.876,83 | | 8.593.720,83 | | 8.795.234,15 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 8.207.000 | 100 | 8.298.206,9 | 100 | 8.421.876,83 | 100 | 8.593.720,83 | 100 | 8.795.234,15 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN | | | | | 47.459.900 | | 47.987.336,4 | | 48.702.501,79 | | 49.696.250,9 | | 50.861.573,42 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 47.459.900 | 100 | 47.987.336,4 | 100 | 48.702.501,79 | 100 | 49.696.250,9 | 100 | 50.861.573,42 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 17.941.500 | | 18.140.889,38 | | 18.411.246,88 | | 18.786.918,76 | | 19.227.451,37 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 17.941.500 | 100 | 18.140.889,38 | 100 | 18.411.246,88 | 100 | 18.786.918,76 | 100 | 19.227.451,37 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 10.000.000 | | 10.111.133,06 | | 10.261.821,41 | | 10.471.208,51 | | 10.716.746,86 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.111.133,06 | 100 | 10.261.821,41 | 100 | 10.471.208,51 | 100 | 10.716.746,86 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2819866330.00 | | 2851204367.66 | | 2893696467.43 | | 2952740832.41 | | 3021979363.02 | |

*Sumber data SIPD Renstra*

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sun Kegiatan Renstra Kecamatan Sukapura

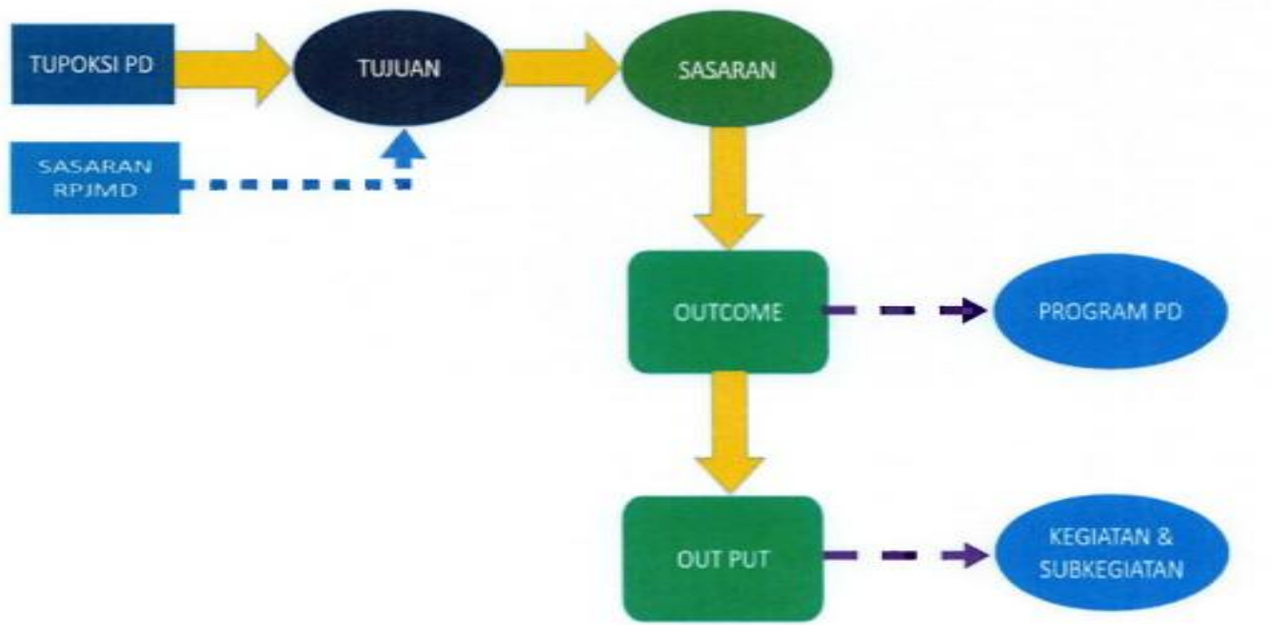

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Sukapura

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Sukapura** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Prosentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |

| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | Prosentase Peningkatan Pelayanan Perinjinan Non Usaha Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Prosentase Kegiatan dan Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Prosentase Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **OUTCOME** | **OUTPUT** | **INDIKATOR** | **PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | |

*Sumber data SIPD Renstra*

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2.1**

**Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Sukapura**

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | |

*Sumber Data Cascading Kecamatan Sukapura*

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut:

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sukapura

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.819.866.330 | | 2.851.204.367,66 | | 2.893.696.467,43 | | 2.952.740.832,41 | | 3.021.979.363,02 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.725.916.430 | | 2.756.210.373,67 | | 2.797.286.757,91 | | 2.854.363.933,12 | | 2.921.295.633,46 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 100 | 100 | 2.725.916.430 | 100 | 2.756.210.373,67 | 100 | 2.797.286.757,91 | 100 | 2.854.363.933,12 | 100 | 2.921.295.633,46 | 7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Sukapura | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 920.000 | | 920.000 | | 2.000.000 | | 2.200.000 | | 2.500.000 | | |
| Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 73,11 | 73,18 | 920.000 | 73,22 | 920.000 | 73,26 | 2.000.000 | 73,29 | 2.200.000 | 73,33 | 2.500.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 73,11 | 73,18 | | 73,22 | | 73,26 | | 73,29 | | 73,33 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 410.000 | | 410.000 | | 1.000.000 | | 1.100.000 | | 1.250.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 73,11 | 73,18 | 410.000 | 73,22 | 410.000 | 73,26 | 1.000.000 | 73,29 | 1.100.000 | 73,33 | 1.250.000 | | |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 510.000 | | 510.000 | | 1.000.000 | | 1.100.000 | | 1.250.000 | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 73,11 | 73,18 | 510.000 | 73,22 | 510.000 | 73,26 | 1.000.000 | 73,29 | 1.100.000 | 73,33 | 1.250.000 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.396.638.702 | | 2.407.410.373,67 | | 2.450.156.657,91 | | 2.477.663.933,12 | | 2.562.756.633,46 | | |
| Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 19 | 19 | 2.396.638.702 | 19 | 2.407.410.373,67 | 19 | 2.450.156.657,91 | 19 | 2.477.663.933,12 | 19 | 2.562.756.633,46 | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.396.638.702 | | 2.407.410.373,67 | | 2.450.156.657,91 | | 2.477.663.933,12 | | 2.562.756.633,46 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 19 | 19 | 2.396.638.702 | 19 | 2.407.410.373,67 | 19 | 2.450.156.657,91 | 19 | 2.477.663.933,12 | 19 | 2.562.756.633,46 | | |
| 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 4.782.100 | | 10.000.000 | | 4.782.100 | | 20.000.000 | | 15.000.000 | | |
| Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 73,11 | 73,18 | 4.782.100 | 73,22 | 10.000.000 | 73,26 | 4.782.100 | 73,29 | 20.000.000 | 73,33 | 15.000.000 | | |
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 73,11 | 73,18 | | 73,22 | | 73,26 | | 73,29 | | 73,33 | | | |
| 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 4.000.000 | | 9.000.000 | | 4.000.000 | | 18.000.000 | | 13.000.000 | | |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 73,11 | 73,18 | 4.000.000 | 73,22 | 9.000.000 | 73,26 | 4.000.000 | 73,29 | 18.000.000 | 73,33 | 13.000.000 | | |
| 7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 782.100 | | 1.000.000 | | 782.100 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 73,11 | 73,18 | 782.100 | 73,22 | 1.000.000 | 73,26 | 782.100 | 73,29 | 2.000.000 | 73,33 | 2.000.000 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 71.429.000 | | 75.000.000 | | 72.429.000 | | 74.500.000 | | 76.000.000 | | |
| Prosentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 | 2 | 71.429.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 72.429.000 | 2 | 74.500.000 | 2 | 76.000.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.488.200 | | 4.488.200 | | 4.488.200 | | 4.488.200 | | 4.488.200 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 4.488.200 | 1 | 4.488.200 | 1 | 4.488.200 | 1 | 4.488.200 | 1 | 4.488.200 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.139.600 | | 2.139.600 | | 2.139.600 | | 2.139.600 | | 2.139.600 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 2.139.600 | 1 | 2.139.600 | 1 | 2.139.600 | 1 | 2.139.600 | 1 | 2.139.600 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.557.400 | | 3.557.400 | | 3.557.400 | | 3.557.400 | | 3.557.400 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 3.557.400 | 1 | 3.557.400 | 1 | 3.557.400 | 1 | 3.557.400 | 1 | 3.557.400 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 6.775.800 | | 6.775.800 | | 6.775.800 | | 6.775.800 | | 6.775.800 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 6.775.800 | 1 | 6.775.800 | 1 | 6.775.800 | 1 | 6.775.800 | 1 | 6.775.800 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.690.000 | | 3.000.000 | | 2.690.000 | | 2.690.000 | | 2.690.000 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 2.690.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 2.690.000 | 1 | 2.690.000 | 1 | 2.690.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 2.060.000 | | 3.800.000 | | 2.060.000 | | 2.100.000 | | 2.100.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 1 | 2.060.000 | 1 | 3.800.000 | 1 | 2.060.000 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.100.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4.000.000 | | 5.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 5.500.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 | 2 | 4.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 5.500.000 | | |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 45.718.000 | | 46.239.000 | | 46.718.000 | | 48.749.000 | | 48.749.000 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 45.718.000 | 12 | 46.239.000 | 12 | 46.718.000 | 12 | 48.749.000 | 12 | 48.749.000 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 45.039.000 | | 50.000.000 | | 45.039.000 | | 75.000.000 | | 45.039.000 | | |
| Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 3 | 45.039.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 45.039.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 45.039.000 | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 45.039.000 | | 50.000.000 | | 45.039.000 | | 75.000.000 | | 45.039.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 3 | 45.039.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 45.039.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 45.039.000 | | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 159.227.628 | | 165.000.000 | | 175.000.000 | | 180.000.000 | | 190.000.000 | | |
| Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | 1 | 159.227.628 | 1 | 165.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 190.000.000 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.500.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.500.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 20.000.000 | | 21.000.000 | | 23.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | 3 | 18.000.000 | 3 | 18.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 21.000.000 | 3 | 23.000.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | 4.000.000 | | 5.000.000 | | 7.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 1.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 139.227.628 | | 142.000.000 | | 149.000.000 | | 151.000.000 | | 155.500.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 139.227.628 | 12 | 142.000.000 | 12 | 149.000.000 | 12 | 151.000.000 | 12 | 155.500.000 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 47.880.000 | | 47.880.000 | | 47.880.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | |
| Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 100 | 1 | 47.880.000 | 2 | 47.880.000 | 2 | 47.880.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 30.000.000 | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 17.880.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 13.000.000 | | 13.000.000 | | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 8 | 17.880.000 | 8 | 20.000.000 | 8 | 20.000.000 | 8 | 13.000.000 | 8 | 13.000.000 | | | |
| 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 15.000.000 | | 22.880.000 | | 22.880.000 | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | 7 | 15.000.000 | 7 | 22.880.000 | 7 | 22.880.000 | 7 | 10.000.000 | 7 | 15.000.000 | | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 100 | 1 | 10.000.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 10.341.500 | | 10.456.428,25 | | 10.612.262,61 | | 10.828.800,29 | | 11.082.723,76 | | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 10.341.500 | 100 | 10.456.428,25 | 100 | 10.612.262,61 | 100 | 10.828.800,29 | 100 | 11.082.723,76 | 7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Sukapura | | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 7.672.500 | | 7.756.428,25 | | 7.812.262,61 | | 7.928.800,29 | | 8.082.723,76 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 100 | 100 | 7.672.500 | 100 | 7.756.428,25 | 100 | 7.812.262,61 | 100 | 7.928.800,29 | 100 | 8.082.723,76 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 7.672.500 | | 7.756.428,25 | | 7.812.262,61 | | 7.928.800,29 | | 8.082.723,76 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 100 | 100 | 7.672.500 | 100 | 7.756.428,25 | 100 | 7.812.262,61 | 100 | 7.928.800,29 | 100 | 8.082.723,76 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 2.669.000 | | 2.700.000 | | 2.800.000 | | 2.900.000 | | 3.000.000 | | |
| Prosentase Peningkatan Pelayanan Perinjinan Non Usaha Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 100 | 100 | 2.669.000 | 100 | 2.700.000 | 100 | 2.800.000 | 100 | 2.900.000 | 100 | 3.000.000 | | |
| 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | 2.669.000 | | 2.700.000 | | 2.800.000 | | 2.900.000 | | 3.000.000 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 100 | 100 | 2.669.000 | 100 | 2.700.000 | 100 | 2.800.000 | 100 | 2.900.000 | 100 | 3.000.000 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 8.207.000 | | 8.298.206,9 | | 8.421.876,83 | | 8.593.720,83 | | 8.795.234,15 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 8.207.000 | 100 | 8.298.206,9 | 100 | 8.421.876,83 | 100 | 8.593.720,83 | 100 | 8.795.234,15 | 7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Sukapura | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 8.207.000 | | 8.298.206,9 | | 8.421.876,83 | | 8.593.720,83 | | 8.795.234,15 | | |
| Prosentase Kegiatan dan Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 10 | 22 | 8.207.000 | 22 | 8.298.206,9 | 22 | 8.421.876,83 | 22 | 8.593.720,83 | 22 | 8.795.234,15 | | |
| | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 2.207.000 | | 2.298.206,9 | | 2.321.876,83 | | 2.443.720,83 | | 2.595.234,15 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 10 | 22 | 2.207.000 | 22 | 2.298.206,9 | 22 | 2.321.876,83 | 22 | 2.443.720,83 | 22 | 2.595.234,15 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.100.000 | | 6.150.000 | | 6.200.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 3 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.100.000 | 4 | 6.150.000 | 4 | 6.200.000 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 47.459.900 | | 47.987.336,4 | | 48.702.501,79 | | 49.696.250,9 | | 50.861.573,42 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 47.459.900 | 100 | 47.987.336,4 | 100 | 48.702.501,79 | 100 | 49.696.250,9 | 100 | 50.861.573,42 | 7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Sukapura | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 47.459.900 | | 47.987.336,4 | | 48.702.501,79 | | 49.696.250,9 | | 50.861.573,42 | | |
| Prosentase Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 100 | 100 | 47.459.900 | 100 | 47.987.336,4 | 100 | 48.702.501,79 | 100 | 49.696.250,9 | 100 | 50.861.573,42 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 47.459.900 | | 47.987.336,4 | | 48.702.501,79 | | 49.696.250,9 | | 50.861.573,42 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 100 | 100 | 47.459.900 | 100 | 47.987.336,4 | 100 | 48.702.501,79 | 100 | 49.696.250,9 | 100 | 50.861.573,42 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 17.941.500 | | 18.140.889,38 | | 18.411.246,88 | | 18.786.918,76 | | 19.227.451,37 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 17.941.500 | 100 | 18.140.889,38 | 100 | 18.411.246,88 | 100 | 18.786.918,76 | 100 | 19.227.451,37 | 7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Sukapura | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 17.941.500 | | 18.140.889,38 | | 18.411.246,88 | | 18.786.918,76 | | 19.227.451,37 | | |
| Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 100 | 100 | 17.941.500 | 100 | 18.140.889,38 | 100 | 18.411.246,88 | 100 | 18.786.918,76 | 100 | 19.227.451,37 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 17.941.500 | | 18.140.889,38 | | 18.411.246,88 | | 18.786.918,76 | | 19.227.451,37 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 100 | 100 | 17.941.500 | 100 | 18.140.889,38 | 100 | 18.411.246,88 | 100 | 18.786.918,76 | 100 | 19.227.451,37 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 10.000.000 | | 10.111.133,06 | | 10.261.821,41 | | 10.471.208,51 | | 10.716.746,86 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.111.133,06 | 100 | 10.261.821,41 | 100 | 10.471.208,51 | 100 | 10.716.746,86 | 7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Sukapura | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 10.000.000 | | 10.111.133,06 | | 10.261.821,41 | | 10.471.208,51 | | 10.716.746,86 | | |
| Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.111.133,06 | 0 | 10.261.821,41 | 0 | 10.471.208,51 | 0 | 10.716.746,86 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 0 | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 10.000.000 | | 10.111.133,06 | | 10.261.821,41 | | 10.471.208,51 | | 10.716.746,86 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 10.000.000 | 100 | 10.111.133,06 | 100 | 10.261.821,41 | 100 | 10.471.208,51 | 100 | 10.716.746,86 | | |

*Sumber Data SIPD Renstra*

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas. Penetapannya berlandaskan pada isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kemampuan pendanaan daerah. Secara eksplisit, Program Prioritas Kecamatan Sukapura dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Sukapura** | | | | |
| 1. | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan<br>7.01.02.2.01.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat<br>7.01.02.2.04.001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | SAE KERJA |

*Sumber data SIPD Renstra*

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukapura sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukapura

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Sukapura | | | | | | | | | |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 91,00 | |
| 3. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 85,41 | 86,26 | 87,13 | 88,00 | 88,88 | 89,77 | 90,66 | |
| 4. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

*Sumber data SIPD Renstra*

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Sukapura sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sukapura

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | | | | | | | | | | | |
| **NIHIL** | | | | | | | | | | | |

*Sumber data SIPD Renstra*

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Sukapura.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Sukapura.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Sukapura bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Sukapura.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Sukapura. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;

2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;
3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

CAMAT SUKAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO

**Drs. SAIFUL HIDAYAT, M.M.**
Pembina Tingkat I
NIP. 19671030 199302 1 001

# RENCANA STRATEGIS

# RENSTRA

# TAHUN 2025-2029

## KECAMATAN TEGALSIWALAN

## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalsiwalan Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Tegalsiwalan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tegalsiwalan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Tegalsiwalan dengan Kecamatan dan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.

PROBOLINGGO, Juli 2025

CAMAT TEGALSIWALAN

KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO KECAMATAN TEGALSIWALAN

**HARIYADI, S.Sos, M.Si**

Pembina TK. I

NIP. 19710722 200212 1 002

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 6
1.1 Latar Belakang ..... 6
1.2 Landasan Hukum ..... 7
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 12
1.4 Sistematika Penulisan ..... 13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tegalsiwalan ..... 16
2.2 Sumber Daya Kecamatan Tegalsiwalan ..... 17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalsiwalan ..... 31
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 32
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Tegalsiwalan ..... 32
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Tegalsiwalan ..... 33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 35
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Tahun 2025-2029 ..... 36
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tegalsiwalan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 46
4.1 Uraian Program ..... 46
4.2 Uraian Kegiatan ..... 49
BAB V PENUTUP ..... 75
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 76
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 76

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……..…….……. 24
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ……..…… 25
Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ……..... 26
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ……. 32
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo (2020-2024) …… 33
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Tegalsiwalan ……..… 34
Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ……..…….. 38
Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Tegalsiwalan …… 39
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Tegalsiwalan ……..... 40
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Tegalsiwalan ……..…… 41
Tabel 4.1 Program Kecamatan Tegalsiwalan ……. 48
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tegalsiwalan ……. 51
Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Tegalsiwalan …….. 60
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tegalsiwalan ……. 63
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ……..…… 73
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tegalsiwalan …….. 74
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tegalsiwalan …… 74

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tegalsiwalan ……..…. 23
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ..…. 36
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah ……..…… 37
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tegalsiwalan ……. 50

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Tegalsiwalan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalsiwalan setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Tegalsiwalan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Tegalsiwalan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Tegalsiwalan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Tegalsiwalan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun

2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalsiwalan yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Tegalsiwalan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Tegalsiwalan berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Tegalsiwalan dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Tegalsiwalan disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Tegalsiwalan akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Tegalsiwalan dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Tegalsiwalan untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Tegalsiwalan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta Pembangunan wilayah melalui Perencanaan yang sistematis.

**1.4**

## 1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TEGALSIWALAN**

Bab II memuat :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tegalsiwalan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tegalsiwalan

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalsiwalan

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Tegalsiwalan

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tegalsiwalan

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tegalsiwalan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tegalsiwalan 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tegalsiwalan; dan

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tegalsiwalan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Tegalsiwalan Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
   b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;

c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
   f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi

kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;

d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya

masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Tegalsiwalan**

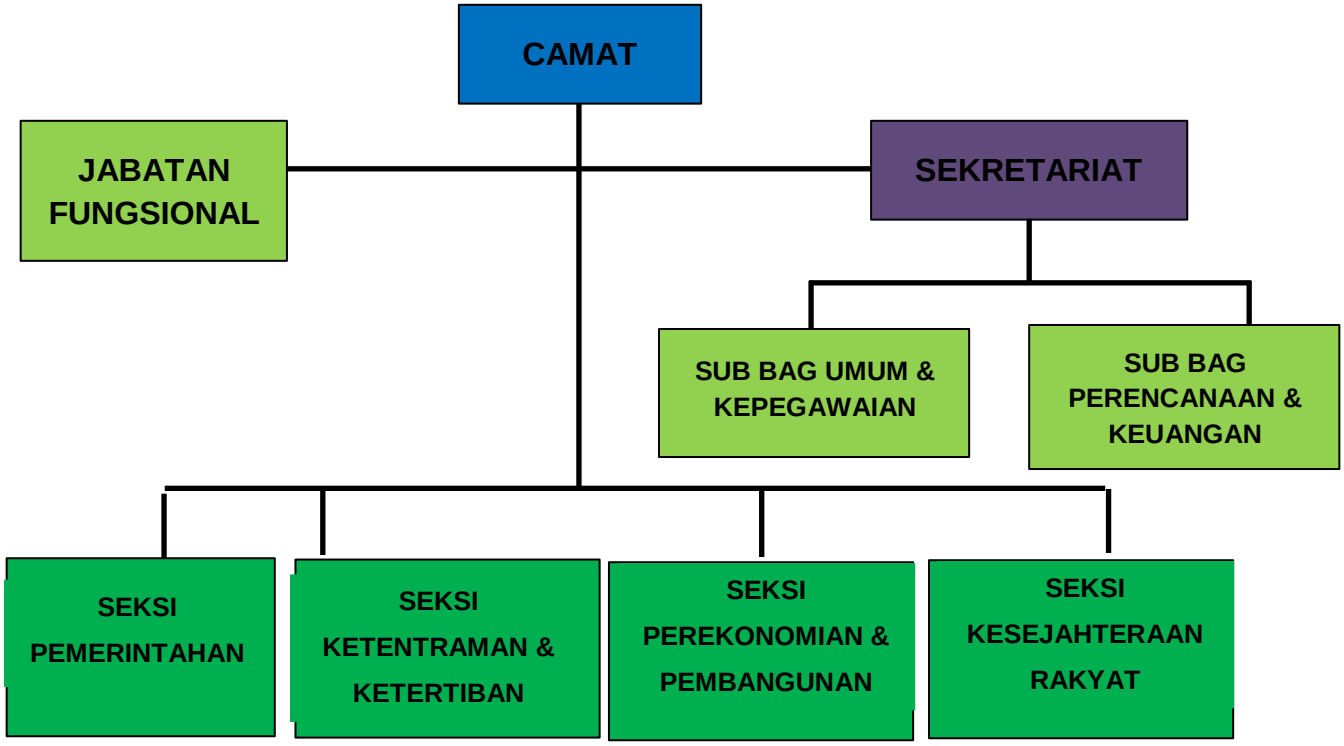


Struktur Organisasi Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Tegalsiwalan

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih

beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Tegalsiwalan.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Tegalsiwalan sebanyak 20 orang dengan rincian : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 17 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 1 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 orang. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 4 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4 orang . Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Tegalsiwalan berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | **4** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | **2** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **2** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | **3** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 10. | Honorer | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | **4** |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **7** | **0** | **11** | **3** | **20** | **1** | **20** |

***Sumber Data : Kecamatan Tegalsiwalan***

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | **19** | - | 1 | - | 4 | **1** |
| 2. | Perempuan | - | | 1 | - | - | - | **1** | - | - | - | - | **-** |
| **Jumlah** | | **-** | **6** | **7** | **1** | **1** | **4** | **20** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** |

***Sumber Data : Kecamatan Tegalsiwalan***

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.3

Jumlah Sarana Prasarana

| No. | Nama Barang | Keterangan | | | Jumlah Aset Yang Tidak terpakai | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit | Rp. | | Unit | | |
| 1 | Staion Wagon | 1 | 169.500.000 | Baik | 2 | | Droping Perlengkapan/Operasional Camat |
| 2 | Spd Motor | 1 | 3.022.500 | Rusak Berat | 1 | | Droping Perlengkapan (Suzuki TRS) |
| 3 | Spd Motor | 1 | 9.500.000 | Rusak Berat | 1 | | Droping Perlengkapan (Garuda Surya / X- 150) |
| 4 | Spd Motor | 1 | 11.275.000 | Baik | 1 | | Droping Perlengkapan |
| 5 | Spd Motor | 1 | 10.030.000 | Kurang Baik | 1 | 10.030.000 | Droping Perlengkapan (Honda Win) |
| 6 | Spd Motor | 1 | 15.053.000 | Kurang Baik | 1 | 15.053.000 | Droping Perlengkapan/Sekca m |
| 7 | Spd Motor | 1 | 13.777.500 | Baik | 1 | 13.777.500 | Droping Perlengkapan/Kasi Pemerintahan |
| 8 | Spd Motor | 1 | 13.700.000 | Baik | 1 | 13.700.000 | Droping Perlengkapan/Kasi Trantib |
| 9 | Spd Motor | 1 | 13.600.000 | Baik | 1 | 13.600.000 | Droping Perlengkapan/Kasi Pembangunan |
| 10 | Spd Motor | 1 | 14.300.000 | Baik | 1 | 14.300.000 | Droping Perlengkapan/Kasi Kesra |
| 11 | Spd Motor | 1 | 15.000.000 | Baik | 1 | 15.000.000 | Droping Perlengkapan/Kasi Ekonomi |
| 12 | Spd Motor | 1 | 15.180.000 | Baik | 1 | 15.180.000 | Droping Perlengkapan |
| 13 | Spd Motor | 1 | 29.875.000 | Baik | 1 | 29.875.000 | Mutasi dari Badan Keuangan Daerah |
| 14 | Mesin Ketik Manual Standar | 1 | 3.050.000 | Rusak Berat | 1 | 3.050.000 | Droping Perlengkapan |
| 15 | Mesin Absen (Time Recorder) | 1 | 18.476.700 | Baik | 1 | 18.476.700 | |
| 16 | Lemari Besi | 1 | 5.475.000 | Baik | 1 | 5.475.000 | Droping Perlengkapan |
| 17 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 1 | 3.200.000 | Rusak Berat | 1 | 3.200.000 | Droping Perlengkapan |
| 18 | Brand Kas | 1 | 5.000.000 | Baik | 1 | 5.000.000 | Belanja Modal Pengadaan Brankas |
| 19 | Mesin Potong Rumput | 1 | 4.000.000 | Baik | 1 | 4.000.000 | Belanja Modal Kantor Kec Tegalsiwalan |
| 20 | Mesin Absens i | 1 | 10.000.000 | Rusak Berat | 1 | 10.000.000 | Belanja Modal Kantor Kec Tegalsiwalan |
| 21 | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) | 1 | 3.050.000 | Rusak Berat | 1 | 3.050.000 | Droping Perlengkapan |
| 22 | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) | 1 | 437.000 | Baik | 1 | 437.000 | Droping Perlengkapan |
| 23 | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) | 1 | 202.500 | Baik | 1 | 202.500 | Droping Perlengkapan |
| 24 | Genset | 1 | 11.750.000 | Baik | | 11.750.000 | Droping Perlengkapan |
| 25 | Rak Besi/Metal | 1 | 39.750 | Rusak Berat | | 39.750 | Droping Perlengkapan |
| 26 | Meja Kerja | 12 | 3.420.000 | Baik | 12 | 3.420.000 | Pembelian Kursi Kantor |
| 27 | Kursi Kayu/Rotan/Bambu | 1 | 7.500.000 | Baik | 1 | 7.500.000 | Pengadaan Sarana dan PrasaranaAparatur |
| 28 | Kursi Besi/Metal | 2 | 5.282.000 | Kurang Baik | 2 | 5.282.000 | Droping Perlengkapan |
| 29 | Kursi Plastik | 1 | 2.640.999,40 | Kurang Baik | 1 | 2.640.999,40 | Droping Perlengkapan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 2.000.000 | Kurang Baik | 1 | 2.000.000 | Kecamatan Tegalsiwalan |
| 31 | Kursi Kerja | 1 | 3.800.000 | Kurang Baik | 1 | 3.800.000 | Droping Perlengkapan |
| 32 | Kursi Kayu/Rotan/Bambu | 1 | 2.000.000 | Kurang Baik | 1 | 2.000.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 33 | Meja Biro | 1 | 13.850.000 | Baik | 1 | 13.850.000 | |
| 34 | P.C Unit/Komputer PC | 1 | 82.556 | Baik | 1 | 82.556 | |
| 35 | Printer | 1 | 82.556 | Baik | 1 | 82.556 | |
| 36 | Facsimile | 1 | 18.000.000 | Baik | 1 | 18.000.000 | |
| 37 | Printer | 2 | 1.300.000 | Rusak Berat | 2 | 1.300.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 38 | Microphone/Wireless Mic | 3 | 1.242.000 | Baik | 3 | 1.242.000 | Droping Bagian Pengelolaan dan Pengadaan |
| 39 | Kursi Lipat | 2 | 5.700.000 | Baik | 2 | 5.700.000 | Droping Bagian Pengelolaan dan Pengadaan |
| 40 | Meja Kerja | 3 | 6.950.000 | Baik | 3 | 6.950.000 | Droping Perlengkapan |
| 41 | Meja Rapat | 1 | 300.000 | Rusak Berat | 1 | 300.000 | Droping Perlengkapan |
| 42 | AC Unit | 1 | 300.000 | Rusak Berat | 1 | 300.000 | Droping Perlengkapan |
| 43 | Mimbar/Pod ium | 15 | 3.292.500 | Rusak Berat | 15 | 3.292.500 | Droping Perlengkapan |
| 44 | Meja Tamu Ruangan Biasa | 1 | 170.000 | Rusak Berat | 1 | 170.000 | Droping Perlengkapan |
| 45 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 3 | 1.350.000 | Rusak Berat | 3 | 1.350.000 | Droping Perlengkapan |
| 46 | P.C Unit/ Kompute r PC | 3 | 1.350.000 | Rusak Berat | 3 | 1.350.000 | Droping Perlengkapan |
| 47 | Filling Besi/Metal | 2 | 2,875.000 | Baik | 2 | 2,875.000 | Droping dari Bagian Pengelolaan dan Pengadaan |
| 48 | Genset | 1 | 2.500.000 | Baik | 1 | 2.500.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 49 | Kursi Kerja | 1 | 4.200.000 | Rusak Berat | 1 | 4.200.000 | Droping Perlengkapan |
| 50 | P.C Unit/ Komputer PC | 1 | 5.775.000 | Baik | 1 | 5.775.000 | Droping Perlengkapan |
| 51 | Lap Top | 1 | 6.500.000 | Baik | 1 | 6.500.000 | Droping dari BagianPemerintahan |
| 52 | Meja Kerja | 2 | 9.600.000 | Baik | 2 | 9.600.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 53 | P.C Unit/ Komputer PC | 1 | 1.600.000 | Baik | 1 | 1.600.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 54 | Lap Top | 1 | 5.000.000 | Baik | 1 | 5.000.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 55 | Meja Kerja | 1 | 6.125.000 | Baik | 1 | 6.125.000 | Droping dari Bagian Pengelolaan dan Pengadaan |
| 56 | P.C Unit/ Komputer PC | 1 | 4.900.000 | Baik | 1 | 4.900.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 57 | Printer | 4 | 12.400.000 | Baik | 4 | 12.400.000 | Sound System Polytron Pass 8C28, MICTOA 2M 260 + STAND |
| 58 | Mimbar/Pod Ium | 1 | 2.000.000 | Rusak Berat | 1 | 2.000.000 | Droping Perlengkapan |
| 59 | PC.Unit/Kompu ter PC | 1 | 7.400.000 | Rusak Berat | 1 | 7.400.000 | Droping Perlengkapan |
| 60 | PC.Unit/Kompu ter PC | 1 | 9.850.000 | Rusak Berat | 1 | 9.850.000 | Droping Perlengkapan |
| 61 | PC.Unit/Kompu ter PC | 1 | 7.518.000 | Baik | 1 | 7.518.000 | Droping Perlengkapan |
| 62 | PC. Unit/Kompu ter PC | 1 | 9.264.500 | Baik | 1 | 9.264.500 | Penyediaan Peralatan Kantor (PC+ Printer) |
| 63 | PC. Unit/Kompu ter PC | 1 | 9.500.000 | Baik | 1 | 9.500.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 64 | PC. Unit/Kompu ter PC | 1 | 9.415.000 | Baik | 1 | 9.415.000 | Droping dari Bagian Pengelolaan dan Pengadaan |
| 65 | PC. Unit/Kompu ter PC | 1 | 9.750.000 | Baik | 1 | 9.750.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | PC. Unit/Kompu ter PC | 1 | 9.400.000 | Baik | 1 | 9.400.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 67 | Genset | 1 | 2.500.000 | Baik | 1 | 2.500.000 | Tegalsiwalan |
| 68 | Kursi Kerja | 1 | 4.200.000 | Rusak Berat | 1 | 4.200.000 | Droping Perlengkapan |
| 69 | P.C Unit/Kompute r PC | 1 | 5.775.000 | Baik | 1 | 5.775.000 | Droping Perlengkapan |
| 70 | Lap Top | 1 | 6.500.000 | Baik | 1 | 6.500.000 | Droping dari Bagian Pemerintahan |
| 71 | Meja Kerja | 2 | 9.600.000 | Baik | 2 | 9.600.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 72 | P.C Unit/Komputer PC | 1 | 1.600.000 | Baik | 1 | 1.600.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 73 | Lap Top | 1 | 5.000.000 | Baik | 1 | 5.000.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 74 | Meja Kerja | 1 | 6.125.000 | Baik | 1 | 6.125.000 | Droping dari Bagian Pengelolaan dan Pengadaan |
| 75 | PC.Unit/Kompu ter PC | 1 | 4.900.000 | Baik | 1 | 4.900.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 76 | Printer | 4 | 12.400.000 | Baik | 4 | 12.400.000 | Sound System Polytron Pass 8C28, MICTOA 2M 260 +STAND |
| 77 | Mimbar/Pod | 1 | 2.000.000 | Rusak | 1 | 2.000.000 | Droping |
| 78 | Mimbar/Podium | 1 | 2.000.000 | Rusak Berat | 1 | | Droping Perlengkapan |
| 79 | PC.Unit/Kompu ter PC | 1 | 7.400.000 | Rusak Berat | 1 | 7.400.000 | Droping Perlengkapan |
| 80 | PC.Unit/Kompu ter PC | 1 | 9.850.000 | Rusak Berat | 1 | 9.850.000 | Droping Perlengkapan |
| 81 | PC.Unit/Kompu ter PC | 1 | 7.518.000 | Baik | 1 | 7.518.000 | Droping Perlengkapan |
| 82 | PC.Unit/Kompu ter PC | 1 | 9.264.500 | Baik | 1 | 9.264.500 | + Printer) |
| 83 | PC.Unit/Kompu ter PC | 1 | 9.500.000 | Baik | 1 | 9.500.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 84 | PC.Unit/Kompu ter PC | 1 | 9.415.000 | Baik | 1 | 9.415.000 | Droping dari Bagian Pengelolaan dan Pengadaan |
| 85 | PC.Unit/Kompu ter PC | 1 | 9.750.000 | Baik | 1 | 9.750.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| 86 | PC. Unit/Kompu ter PC | 1 | 9.400.000 | Baik | 1 | 9.400.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 87 | Lap Top | 1 | 10.000.000 | Baik | 1 | 10.000.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 88 | Lap Top | 1 | 10.000.000 | Baik | 1 | 10.000.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 89 | Lap Top | 1 | 7.000.000 | Baik | 1 | 7.000.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 90 | Lap Top | 1 | 9.950.000 | Baik | 1 | 9.950.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| 91 | Lap Top | 1 | 9.750.000 | Baik | 1 | 9.750.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 92 | Lap Top | 1 | 8.300.000 | Baik | | 8.300.000 | Pembelian Laptop DELL INSPIRON 3467 Core i5 |
| 93 | Lap Top | 1 | 8.900.000 | Baik | 1 | 8.900.000 | Belanja Modal Laptop Merk Acer Type E5-476G, Intel coreI5, 4 GB, HDD 1 TB |
| 94 | Lap Top | | 31.800.000 | Baik | | 31.800.000 | SWIFT 3, INTEL CORE I5 82500, DDR 48 GB, 256 SSD, 13,3 WIN 10 |
| 95 | Net Book | 1 | 8.068.000 | Baik | 1 | 8.068.000 | Droping Perlengkapan |
| 96 | Lap Top Net Book | 1 | 6.450.000 | Baik | 1 | 6.450.000 | Belanja Modal Pengadaan 2 buah Note Book |
| 97 | Hard Disk | 1 | 503.500 | Rusak Berat | 1 | 503.500 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 98 | Hard Disk | 1 | 560.000 | Rusak Berat | 1 | 560.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Hard Disk | 1 | 535.000 | Rusak Berat | 1 | 535.000 | Pembelian Peralatan Komputer (hardisk) |
| 100 | Printer | 1 | 7.585.000 | RusakBerat | 1 | 7.585.000 | Droping Perlengkapan |
| 101 | Printer | 1 | 700.000 | Rusak Berat | 1 | 700.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 102 | Printer | 1 | 1.310.000 | Baik | | 1.310.000 | Droping dari Bagian Pengelolaan dan Pengadaan |
| 103 | Flashdisk | 2 | 440.000 | Rusak Berat | 2 | 440.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 104 | Flashdisk | 4 | 400.000 | Rusak Berat | 4 | 400.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 105 | Printer | 1 | 800.000 | Rusak Berat | 1 | 800.000 | Droping Perlengkapan |
| 106 | Printer | 2 | 1.800.000 | Baik | 2 | 1.800.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 107 | Printer | 7 | 4.375.000 | Baik | 7 | 4.375.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 108 | Printer | 2 | 4.100.000 | Baik | 2 | 4.100.000 | Belanja Modal Kecamatan Tegalsiwalan |
| 109 | Printer | 1 | 3.650.000 | Baik | 1 | 3.650.000 | Belanja Modal Printer Injek A3 |
| 110 | Printer | 1 | 2.500.000 | Baik | 1 | 2.500.000 | Belanja Modal Printer Injek Merk Epson |
| 111 | Printer | 2 | 9.000.000 | Baik | 2 | 9.000.000 | Belanja Modal Printer A One L5190 (Printer, Scan Copy)ll In |
| 112 | Printer | 2 | 4.400.000 | Baik | 2 | 4.400.000 | Printer Inkjet L-1110 |
| 113 | Scanner | 1 | 3.000.000 | Baik | 1 | 3.000.000 | Belanja Modal Scanner merk Canon type P208II, 600 dpi, CSI X 1, color 48-bit, simplex, F4/folio, letter, A4,Max.216x356 mm (8.5 x14 ) |
| 114 | Peralatan Personal Komputer lainnya | 1 | 3.500.000 | Baik | 1 | 3.500.000 | Blj. Modal Kec. Tegalsiwalan |
| 115 | Hard disk Internal | 2 | 440.000 | Rusak Berat | 2 | 440.000 | Blj. Modal Kec. Tegalsiwalan |
| 116 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 752.000 | | 1 | 752.000 | Droping Perlengkapan |
| 117 | Meja Kerja | 3 | 3.570.000 | Rusak Berat | 3 | 3.570.000 | Droping Perlengkapan |
| 118 | Meja Kerja | 2 | 2.800.000 | Rusak Berat | 2 | 2.800.000 | Droping Perlengkapan |
| 119 | Meja Kerja | 1 | 1.500.000 | Rusak Berat | 1 | 1.500.000 | Blj. Modal Kec. Tegalsiwalan |
| 120 | Meja Kerja | 4 | 3.000.000 | Rusak Berat | 4 | 3.000.000 | Blj. Modal Kec. Tegalsiwalan |
| 121 | Meja Rapat Pejabat Eselon III | 1 | 3.450.000 | Baik | 1 | 3.450.000 | MEJA RAPAT BAHAN CAMPUR POLITUR, 20 CM X 60 CM X100 CM |
| 122 | Meja Rapat Pejabat Eselon III | 1 | 3.450.000 | Baik | 1 | 3.450.000 | \ |
| 123 | Meja Tamu Ruangan barat | 1 | 2.950.000 | Rusak Berat | 1 | 2.950.000 | Droping Perlengkapan |
| 124 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 2.000.000 | Rusak Berat | 1 | 2.000.000 | Droping Perlengkapan |
| 125 | Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis | 1 | 3.200.000 | Rusak Berat | 1 | 3.200.000 | Droping Perlengkapan |
| 126 | Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis | 1 | 2.200.000 | Baik | 1 | 2.200.000 | Droping dari Bagian Pengelolaan dan Pengadaan |
| 127 | Proyektor + Attachment | 1 | 6.950.000 | Baik | 1 | 6.950.000 | 15000:1 Belanja modal LCD Proyektor Epson EB W05/WXGA (1200 x 800), 3300 Lumens, Contrast Ratio:15000:1 |
| 128 | Microphone/Wireless | 1 | 6.250.000 | Rusak Berat | 1 | 6.250.000 | Droping Perlengkapan |
| 129 | Layar Proyektor | 1 | 10.000.000 | Baik | 1 | 10.000.000 | Blj. Modal Kec. Tegalsiwalan |
| 130 | Facsimile | 1 | 2.500.000 | Rusak Berat | 1 | 2.500.000 | Blj. Modal Kec. Tegalsiwalan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Alat Komunikasi lain-lain | 1 | 5.661.000 | Rusak Berat | 1 | 5.661.000 | Telepon |
| 132 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 518.516.707,80 | Baik | 1 | 518.516.707,00 | Hibah, Gedung Kantor Unit 1 |
| 133 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 25.941.418 | Baik | 1 | 25.941.418 | Hobah, Gedung Kantor Unit 2 |
| 134 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 21.000.195 | Baik | 1 | 21.000.195 | Hibah, Gedung Kantor Unit 3 |
| 135 | Jalan Kabupaten lain-lain | 1 | 150.696.000 | Baik | 1 | 150.696.000 | Desa Malasan Wetan |
| 136 | Tanah bangunan Kantor Pemerintah | 1 | 526.666.666,60 | Baik | | | |
| 137 | Leptop HP/4522100001 | | 14.550.000 | Baik | 1 | 14.550.000 | Pengurus Barang Kecamatan |
| 138 | Kombuter Destop | 1 | 10.350.000 | Baik | 1 | 10.350.000 | Kasi Kesra Kec Tegalsiwalan |
| 139 | Printer Injek Epsen L3210 | 1 | 4.150.000 | Baik | 1 | 4.150.000 | Kasi Kesra Kec Tegalsiwalan |

***Sumber Data : Kecamatan Tegalsiwalan***

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalsiwalan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalsiwalan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Tegalsiwalan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Tegalsiwalan dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

Target dan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 91,40 | 81,88 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 91,40 | 81,88 | 99,89 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 98,60 | 88,89 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 98,60 | 88,89 | 99,99 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 94,70 | 89,28 | 83,70 | 0,00 | 0,00 | 94,70 | 89,28 | 83,70 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | - | - | - | - | 100 | | | | | 99,99 | 0,00 | 0,00 | - | - | 99,99 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | - | - | 80 | 80 | 74 | | | 72,61 | 72,76 | 72,76 | 0,00 | 0,00 | 90,76 | 90,95 | 98,32 |

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | **2.660.439.280,00** | **2.847.529.866,00** | **2.849.122.791,00** | - | - | **2.503.979.080,00** | **2.640.402.334,00** | **2.651.825.236,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **94,12** | **92,73** | **93,08** | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 8.860.000,00 | 7.704.000,00 | 16.040.000,00 | - | - | 8.860.000,00 | 4.944.000,00 | 15.591.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 64,17 | 97,20 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 6.460.000,00 | 2.200.000,00 | 1.200.000,00 | | | 6.460.000,00 | 2.175.000,00 | 1.170.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 98,86 | 97,50 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | 1.200.000,00 | 3.504.000,00 | 960.000,00 | | | 1.200.000,00 | 975.000,00 | 819.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 27,83 | 85,31 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | | - | 960.000,00 | | | - | - | 936.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,50 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | 1.200.000,00 | 2.000.000,00 | 960.000,00 | | | 1.200.000,00 | 1.794.000,00 | 936.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 89,70 | 97,50 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | | - | 960.000,00 | | | - | - | 936.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,50 | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | - | 11.000.000,00 | | | - | - | 10.794.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,13 | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.261.304.000,00 | 2.535.888.686,00 | 2.534.644.000,00 | - | - | 2.113.273.455,00 | 2.365.094.187,00 | 2.357.481.813,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,45 | 93,26 | 93,01 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | 2.701.039.000,00 | 2.512.386.686,00 | 2.503.314.000,00 | - | - | 2.108.988.455,00 | 2.349.746.187,00 | 2.327.426.813,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 78,08 | 93,53 | 92,97 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | 7.840.000,00 | 23.502.000,00 | 30.530.000,00 | - | - | 4.285.000,00 | 15.348.000,00 | 29.275.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 54,66 | 65,31 | 95,89 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | | - | 800.000,00 | - | - | - | - | 780.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 51.758.000,00 | 42.783.800,00 | 56.117.131,00 | - | - | 51.112.900,00 | 41.036.350,00 | 53.186.650,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,75 | 95,92 | 94,78 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | | | 3.128.000,00 | - | - | | | 3.125.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,90 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 24.738.000,00 | 20.883.800,00 | 15.435.400,00 | - | - | 24.662.900,00 | 19.136.350,00 | 14.433.150,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,70 | 91,63 | 93,51 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | | | 8.520.000,00 | - | - | | | 8.458.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,28 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | - | 27.020.000,00 | 21.900.000,00 | 23.301.600,00 | - | - | 26.450.000,00 | 21.900.000,00 | 21.450.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,89 | 100,00 | 92,05 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | - | | | 5.732.131,00 | - | - | | - | 5.720.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,79 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 283.531.980,00 | 223.153.380,00 | 178.384.660,00 | - | - | 275.952.625,00 | 192.147.497,00 | 167.610.973,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,33 | 86,11 | 93,96 | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | 22.752.000,00 | 28.502.200,00 | 28.500.000,00 | | - | 20.084.546,00 | 22.248.276,00 | 21.569.045,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 88,28 | 78,06 | 75,68 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | | | 8.240.000,00 | | - | | | 8.225.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,82 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | 260.779.980,00 | 194.651.180,00 | 141.644.660,00 | | - | 255.868.079,00 | 169.899.221,00 | 137.816.928,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,12 | 87,28 | 97,30 | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah | - | - | 54.985.300,00 | | 29.337.000,00 | | | 49.157.400,00 | | 29.050.000,00 | | | | | | | |
| Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | - | - | | | 29.337.000,00 | | | | | 29.050.000,00 | | | | | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | 38.000.000,00 | 34.600.000,00 | - | - | | 37.180.300,00 | 28.904.800,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,84 | 83,54 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | 18.421.000,00 | 19.640.000,00 | 5.600.000,00 | | - | 18.217.600,00 | 19.037.800,00 | 2.219.800,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,90 | 96,93 | 39,64 | | |
| Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | - | - | | | 12.000.000,00 | | | | | 9.685.000,00 | | | | | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | 36.564.300,00 | 18.360.000,00 | 17.000.000,00 | | - | 36.562.500,00 | 18.142.500,00 | 17.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 98,82 | 100,00 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | **73.931.500,00** | **54.512.000,00** | **24.650.000,00** | **-** | **-** | **73.531.400,00** | **41.265.000,00** | **22.800.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **99,46** | **75,70** | **92,49** | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 49.557.500,00 | 26.056.000,00 | 12.600.000,00 | - | - | 49.157.400,00 | 23.255.000,00 | 12.390.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,19 | 89,25 | 98,33 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | - | 26.680.000,00 | 16.456.000,00 | 12.600.000,00 | - | - | | 15.065.000,00 | 12.390.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 91,55 | 98,33 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 22.877.500,00 | 9.600.000,00 | - | - | - | - | 8.190.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 85,31 | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 24.374.000,00 | 28.456.000,00 | 12.050.000,00 | - | - | 24.374.000,00 | 24.374.000,00 | 10.410.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 85,66 | 86,39 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | - | - | 7.200.000,00 | 10.800.000,00 | | - | - | 7.200.000,00 | 6.010.000,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 55,65 | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | - | 17.174.000,00 | 17.656.000,00 | 12.050.000,00 | - | - | 17.174.000,00 | 12.000.000,00 | 10.410.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 67,97 | 86,39 | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | - | **178.624.000,00** | **321.756.000,00** | **21.298.000,00** | **-** | **-** | **152.924.000,00** | **286.711.750,00** | **16.837.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **85,61** | **89,11** | **79,05** | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 178.624.000,00 | 321.756.000,00 | 10.340.000,00 | - | - | 152.924.000,00 | 286.711.750,00 | 7.410.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 85,61 | 89,11 | 71,66 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | 15.174.000,00 | 8.956.000,00 | 4.000.000,00 | - | - | 12.174.000,00 | 8.050.000,00 | 3.900.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80,23 | 89,88 | 97,50 | | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | - | 163.450.000,00 | 262.800.000,00 | 6.340.000,00 | - | - | 140.750.000,00 | 232.580.950,00 | 3.510.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86,11 | 88,50 | 55,36 | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 46.080.800,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 92,16 | #DIV/0! | | |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 46.080.800,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 92,16 | #DIV/0! | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | 10.958.000,00 | - | - | - | - | 9.427.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 86,03 | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | - | 10.958.000,00 | - | - | - | - | 9.427.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 86,03 | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | - | **46.609.800,00** | **63.264.400,00** | **49.673.500,00** | **-** | **-** | **45.706.800,00** | **45.706.800,00** | **48.229.500,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **98,06** | **72,25** | **97,09** | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 46.609.800,00 | 63.264.400,00 | 49.673.500,00 | - | - | 45.706.800,00 | 55.756.000,00 | 48.229.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,06 | 88,13 | 97,09 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | 42.289.800,00 | 56.864.400,00 | 46.473.500,00 | - | - | 41.386.800,00 | 50.881.000,00 | 45.109.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,86 | 89,48 | 97,06 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | 4.320.000,00 | 6.400.000,00 | 3.200.000,00 | - | - | 4.320.000,00 | 4.875.000,00 | 3.120.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 76,17 | 97,50 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | - | **56.088.000,00** | **68.423.000,00** | **70.866.000,00** | **-** | **-** | **56.064.000,00** | **65.048.000,00** | **61.367.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **99,96** | **95,07** | **86,60** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 56.088.000,00 | 68.423.000,00 | 70.866.000,00 | - | - | 56.064.000,00 | 65.048.000,00 | 61.367.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,96 | 95,07 | 86,60 | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | - | 42.888.000,00 | 53.683.000,00 | 57.466.000,00 | - | - | 42.864.000,00 | 51.238.000,00 | 48.237.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,94 | 95,45 | 83,94 | | |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | 13.200.000,00 | 14.740.000,00 | 7.400.000,00 | | | 13.200.000,00 | 13.810.000,00 | 7.280.000,00 | | | | | | | |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan | | | | | 6.000.000,00 | | | | | 5.850.000,00 | | | | | | | |
| PROGRAM PEMBINAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | 5.400.000,00 | | 6.000.000,00 | | | 5.400.000,00 | | 8.775.000,00 | | | | | | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 5.400.000,00 | | 11.200.000,00 | | | 5.400.000,00 | | 8.775.000,00 | | | | | | | |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa | | | | | 3.600.000,00 | | | | | 3.510.000,00 | | | | | | | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | 4.000.000,00 | | | | | 2.925.000,00 | | | | | | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | 3.600.000,00 | | | | | 2.340.000,00 | | | | | | | |
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | 5.400.000,00 | | | | | 5.400.000,00 | | | | | | | | | |
| **Jumlah** | - | - | **3.021.092.580,00** | **3.355.485.266,00** | **3.026.810.291,00** | **-** | **-** | **2.837.605.280,00** | **3.109.248.284,00** | **2.809.833.736,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **93,93** | **92,66** | **92,83** | | |

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah Kecamatan Tegalsiwalan :

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tegalsiwalan

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan :

- **Keterbatasan Sumber Daya** : Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur** : Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.

- **Birokrasi yang Kaku** : Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.
- **Akses dan Kesenjangan Digital** : Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah** : Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital** : Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar-Sektor** : Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur** : Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu** : Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat** : Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tegalsiwalan

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Tegalsiwalan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

## Tabel 2.6

## Isu Strategis Kecamatan Tegalsiwalan

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti kawasan pegunungan | Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah<br><br>Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim<br><br>Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, serta kehutanan | Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |
| | Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi,***

***Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalsiwalan, dalam hal ini Kecamatan Tegalsiwalan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

**Gambar 3.1**

**Konsep Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo**

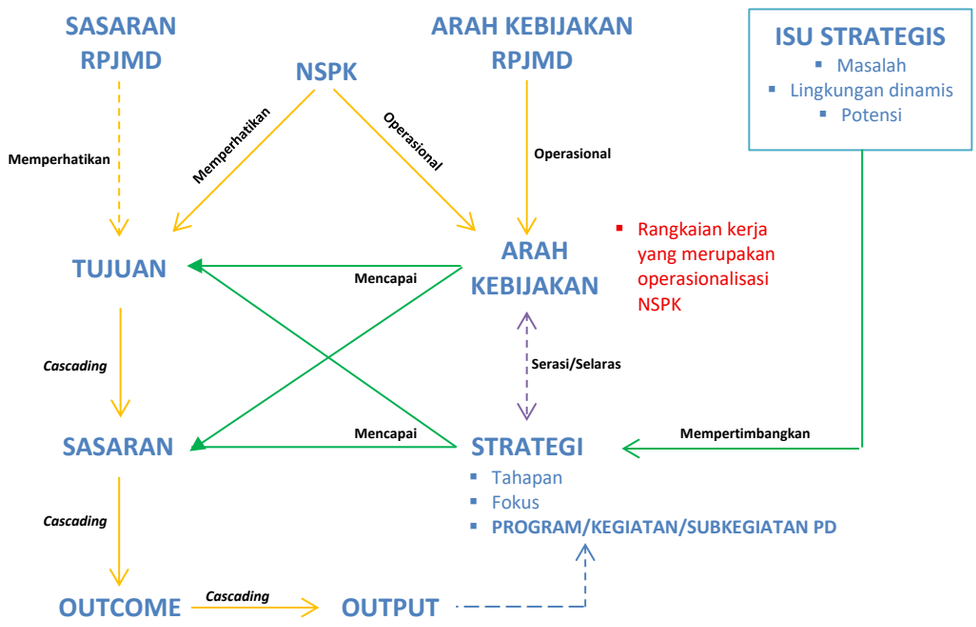

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.2**

**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**

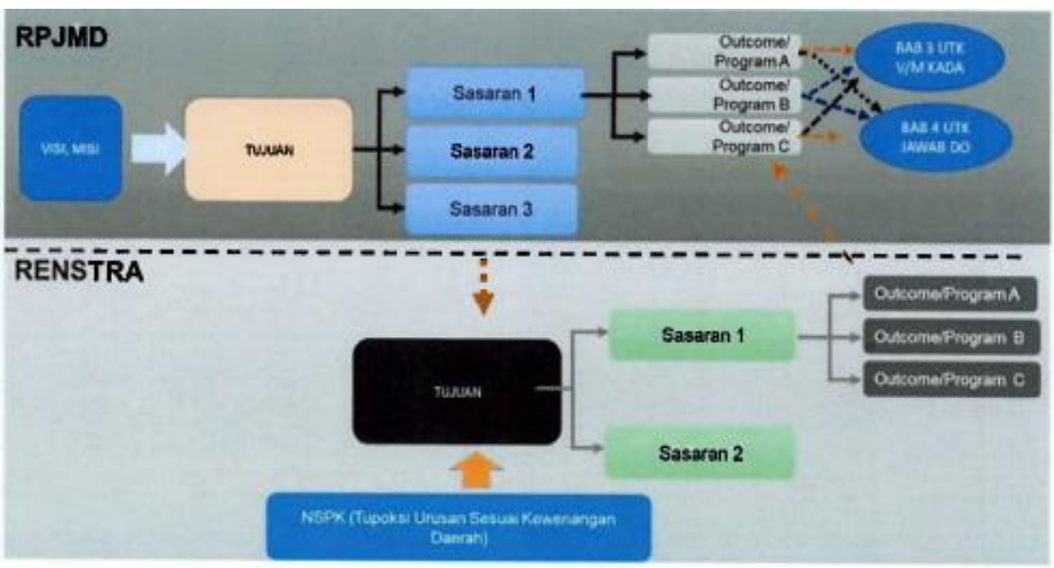

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tegalsiwalan

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan TEGALSIWALAN** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 88,82 | 89,71 | 90.61 | 91.51 | 92,43 | 93,35 | 94,28 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, diperlukan Misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam

mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tegalsiwalan

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

**Tabel 3.1.2**

**Definisi Operasional IKU Kecamatan Tegalsiwalan**

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut :<br>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| 3. | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai hasil atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | $\frac{\text{Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1)}}{\text{Nilai LHE AKIP tahun (n-1)}} \times 100$<br><br>Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Tegalsiwalan***

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tegalsiwalan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Tegalsiwalan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

### B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Tegalsiwalan

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Tegalsiwalan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Kecamatan Tegalsiwalan**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

***Sumber Data : Kecamatan Tegalsiwalan***

## C. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Tegalsiwalan

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Tegalsiwalan sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Tegalsiwalan :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Tegalsiwalan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada

setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Tegalsiwalan, sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Kecamatan Tegalsiwalan**

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul; | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

***Sumber Data : Kecamatan Tegalsiwalan***

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat

melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

## Tabel 4.1

## Program Kecamatan Tegalsiwalan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 – KECAMATAN | | | | | 2.940.033.603,32 | | 2.972.707.096,68 | | 3.017.009.977,22 | | 3.078.570.489,52 | | 3.150.759.587,46 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.786.544.603,32 | | 2.817.512.326,44 | | 2.859.502.306,61 | | 2.917.848.957,59 | | 2.986.269.312,04 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,76 | 72,8 | 72,83 | 2.786.544.603,32 | 72,87 | 2.817.512.326,44 | 72,91 | 2.859.502.306,61 | 72,94 | 2.917.848.957,59 | 72,98 | 2.986.269.312,04 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 16.000.000 | | 16.177.812,9 | | 16.418.914,25 | | 16.753.933,61 | | 17.146.794,97 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan public | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 16.000.000 | 100 | 16.177.812,9 | 100 | 16.418.914,25 | 100 | 16.753.933,61 | 100 | 17.146.794,97 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 24.000.000 | | 24.266.719,35 | | 24.628.371,38 | | 25.130.900,01 | | 25.720.192,04 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 24.000.000 | 100 | 24.266.719,35 | 100 | 24.628.371,38 | 100 | 25.130.900,01 | 100 | 25.720.192,04 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 64.689.000 | | 65.407.908,66 | | 66.382.696,51 | | 67.737.200,76 | | 69.325.563,75 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 64.689.000 | 100 | 65.407.908,66 | 100 | 66.382.696,51 | 100 | 67.737.200,76 | 100 | 69.325.563,75 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 36.800.000 | | 37.208.969,66 | | 37.763.502,78 | | 38.534.047,33 | | 39.437.628,43 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 36.800.000 | 100 | 37.208.969,66 | 100 | 37.763.502,78 | 100 | 38.534.047,33 | 100 | 39.437.628,43 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 12.000.000 | | 12.133.359,67 | | 12.314.185,69 | | 12.565.450,22 | | 12.860.096,23 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.133.359,67 | 100 | 12.314.185,69 | 100 | 12.565.450,22 | 100 | 12.860.096,23 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2940033603.32 | | 2972707096.68 | | 3017009977.22 | | 3078570489.52 | | 3150759587.46 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

## 4.2 Uraian iatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sun Kegiatan Renstra Kecamatan

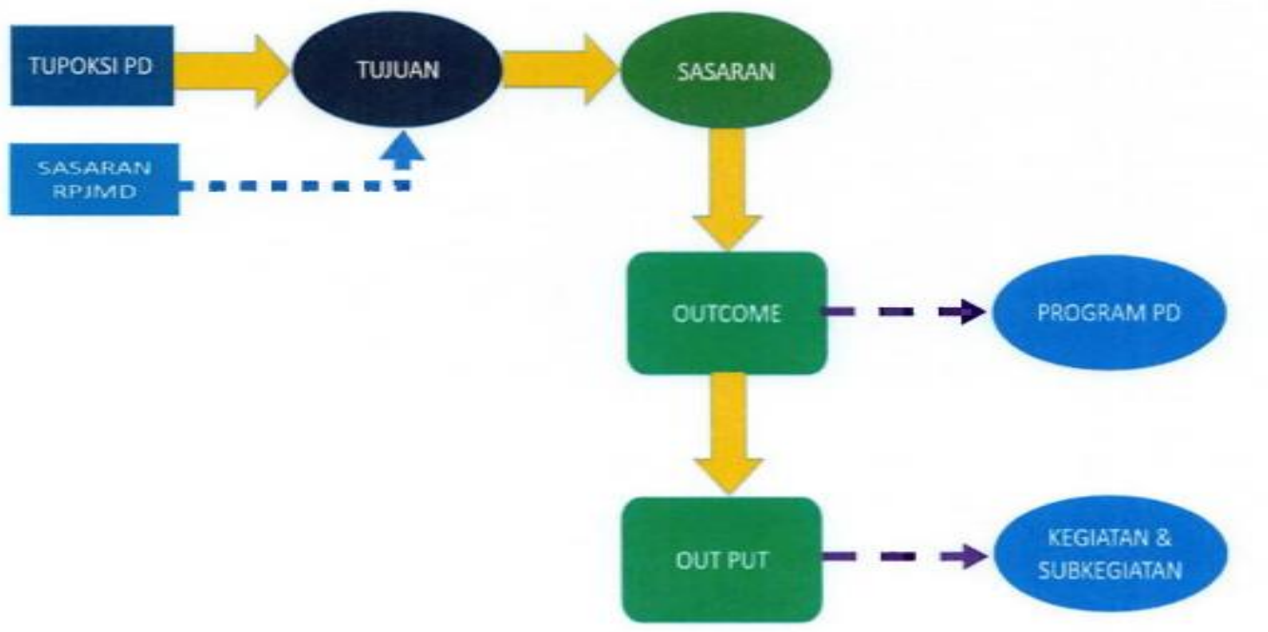

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Tegalsiwalan

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tegalsiwalan** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara berkualitas (%) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | Prosentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | Prosentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | Presentase fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketrban umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |
| | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Peresentase desa / kelurahan yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2.1**

**Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Tegalsiwalan**

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | |

***Sumber Data : Cascading Kecamatan Tegalsiwalan***

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada table sebagai berikut :

## Tabel 4.3

## Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tegalsiwalan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | 2.940.033.603,32 | | 2.972.707.096,68 | | 3.017.009.977,22 | | 3.078.570.489,52 | | 3.150.759.587,46 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.786.544.603,32 | | 2.817.512.326,44 | | 2.859.502.306,61 | | 2.917.848.957,59 | | 2.986.269.312,04 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 72,76 | 72,83 | 2.786.544.603,32 | 72,87 | 2.817.512.326,44 | 72,91 | 2.859.502.306,61 | 72,94 | 2.917.848.957,59 | 72,98 | 2.986.269.312,04 | 7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tegalsiwalan |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4.721.900 | | 13.750.000 | | 13.750.000 | | 13.750.000 | | 13.750.000 | |
| Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | 8 | 4.721.900 | 8 | 13.750.000 | 8 | 13.750.000 | 8 | 13.750.000 | 8 | 13.750.000 | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 721.900 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 7 | 721.900 | 7 | 1.000.000 | 7 | 1.000.000 | 7 | 1.000.000 | 7 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | 4 | 1.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2.000.000 | | 9.750.000 | | 9.750.000 | | 9.750.000 | | 9.750.000 | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | 20 | 2.000.000 | 20 | 9.750.000 | 20 | 9.750.000 | 20 | 9.750.000 | 20 | 9.750.000 | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.437.014.515,32 | | 2.440.585.713,44 | | 2.440.585.713,61 | | 2.448.317.713,59 | | 2.452.747.988,04 | |
| Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | 1 | 2.437.014.515,32 | 1 | 2.440.585.713,44 | 1 | 2.440.585.713,61 | 1 | 2.448.317.713,59 | 1 | 2.452.747.988,04 | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 19 | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.418.040.515,32 | | 2.418.040.516,44 | | 2.418.040.516,61 | | 2.425.772.516,59 | | 2.430.202.791,04 | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 19 | 18 | 2.418.040.515,32 | 18 | 2.418.040.516,44 | 18 | 2.418.040.516,61 | 18 | 2.425.772.516,59 | 18 | 2.430.202.791,04 | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 17.974.000 | | 18.284.000 | | 18.284.000 | | 18.284.000 | | 18.284.000 | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 17.974.000 | 12 | 18.284.000 | 12 | 18.284.000 | 12 | 18.284.000 | 12 | 18.284.000 | |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1.000.000 | | 4.261.197 | | 4.261.197 | | 4.261.197 | | 4.261.197 | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | 4 | 1.000.000 | 4 | 4.261.197 | 4 | 4.261.197 | 4 | 4.261.197 | 4 | 4.261.197 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
| 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 43.044.600 | | 50.963.025 | | 50.963.025 | | 78.906.656 | | 95.837.725 | |
| Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | 2 | 43.044.600 | 2 | 50.963.025 | 2 | 50.963.025 | 2 | 78.906.656 | 2 | 95.837.725 | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.500.000 | | 3.450.000 | | 3.450.000 | | 3.450.000 | | 3.450.000 | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 1 | 1.500.000 | 1 | 3.450.000 | 1 | 3.450.000 | 1 | 3.450.000 | 1 | 3.450.000 | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.134.600 | | 10.134.600 | | 10.134.600 | | 25.000.000 | | 35.000.000 | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | 2 | 10.134.600 | 2 | 10.134.600 | 2 | 10.134.600 | 2 | 25.000.000 | 2 | 35.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 2.470.000 | | 4.818.000 | | 4.818.000 | | 4.818.000 | | 4.818.000 | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | 1 | 2.470.000 | 1 | 4.818.000 | 1 | 4.818.000 | 1 | 4.818.000 | 1 | 4.818.000 | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.940.000 | | 24.990.700 | | 24.990.700 | | 38.068.931 | | 45.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 23.940.000 | 4 | 24.990.700 | 4 | 24.990.700 | 4 | 38.068.931 | 4 | 45.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | 7.569.725 | | 7.569.725 | | 7.569.725 | | 7.569.725 | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | 12 | 5.000.000 | 12 | 7.569.725 | 12 | 7.569.725 | 12 | 7.569.725 | 12 | 7.569.725 | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 10.552.000 | | 10.552.000 | | 22.051.980 | | 49.723.000 | | 56.782.011 | |
| Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | 1 | 10.552.000 | 1 | 10.552.000 | 1 | 22.051.980 | 1 | 49.723.000 | 1 | 56.782.011 | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.552.000 | | 10.552.000 | | 22.051.980 | | 49.723.000 | | 56.782.011 | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 5 | 10.552.000 | 5 | 10.552.000 | 5 | 22.051.980 | 5 | 49.723.000 | 5 | 56.782.011 | |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 256.053.088 | | 259.503.088 | | 269.993.088 | | 269.993.088 | | 285.993.088 | |
| Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 256.053.088 | 12 | 259.503.088 | 12 | 269.993.088 | 12 | 269.993.088 | 12 | 285.993.088 | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 51.000.000 | | 51.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 51.000.000 | 12 | 51.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 70.000.000 | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.060.000 | | 7.510.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | 4 | 4.060.000 | 4 | 7.510.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 15.000.000 | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 200.993.088 | | 200.993.088 | | 200.993.088 | | 200.993.088 | | 200.993.088 | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 200.993.088 | 12 | 200.993.088 | 12 | 200.993.088 | 12 | 200.993.088 | 12 | 200.993.088 | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 35.158.500 | | 42.158.500 | | 62.158.500 | | 57.158.500 | | 81.158.500 | |
| Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 35.158.500 | 1 | 42.158.500 | 1 | 62.158.500 | 1 | 57.158.500 | 1 | 81.158.500 | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | |
| | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 5.158.500 | | 5.158.500 | | 5.158.500 | | 5.158.500 | | 5.158.500 | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 8 | 5.158.500 | 8 | 5.158.500 | 8 | 5.158.500 | 8 | 5.158.500 | 8 | 5.158.500 | |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | 12.000.000 | | 17.000.000 | | 12.000.000 | | 16.000.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | 10.000.000 | | 12.000.000 | | 17.000.000 | | 12.000.000 | | 16.000.000 | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 60.000.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 60.000.000 | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 16.000.000 | | 16.177.812,9 | | 16.418.914,25 | | 16.753.933,61 | | 17.146.794,97 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 16.000.000 | 100 | 16.177.812,9 | 100 | 16.418.914,25 | 100 | 16.753.933,61 | 100 | 17.146.794,97 | 7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tegalsiwalan |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 7.000.000 | | 7.100.000 | | 7.810.000 | | 8.591.000 | | 9.450.100 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 7.000.000 | 3 | 7.100.000 | 3 | 7.810.000 | 3 | 8.591.000 | 3 | 9.450.100 | |
| | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 7.000.000 | | 7.100.000 | | 7.810.000 | | 8.591.000 | | 9.450.100 | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 3 | 3 | 7.000.000 | 3 | 7.100.000 | 3 | 7.810.000 | 3 | 8.591.000 | 3 | 9.450.100 | |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 9.000.000 | | 9.077.812,9 | | 8.608.914,25 | | 8.162.933,61 | | 7.696.694,97 | |
| Prosentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | | 6 | 9.000.000 | 6 | 9.077.812,9 | 6 | 8.608.914,25 | 6 | 8.162.933,61 | 6 | 7.696.694,97 | |
| | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | 9.000.000 | | 9.077.812,9 | | 8.608.914,25 | | 8.162.933,61 | | 7.696.694,97 | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 4 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.077.812,9 | 4 | 8.608.914,25 | 4 | 8.162.933,61 | 4 | 7.696.694,97 | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 24.000.000 | | 24.266.719,35 | | 24.628.371,38 | | 25.130.900,01 | | 25.720.192,04 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 24.000.000 | 100 | 24.266.719,35 | 100 | 24.628.371,38 | 100 | 25.130.900,01 | 100 | 25.720.192,04 | 7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tegalsiwalan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 15.000.000 | | 14.366.719,35 | | 14.993.391 | | 14.532.422,01 | | 14.725.714,04 | |
| Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 3 | 3 | 15.000.000 | 3 | 14.366.719,35 | 3 | 14.993.391 | 3 | 14.532.422,01 | 3 | 14.725.714,04 | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 3.000.000 | | 3.100.000 | | 3.000.000 | | 3.300.000,01 | | 3.300.000,04 | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.100.000 | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.300.000,01 | 8 | 3.300.000,04 | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 12.000.000 | | 11.266.719,35 | | 11.993.391 | | 11.232.422 | | 11.425.714 | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 3 | 3 | 12.000.000 | 3 | 11.266.719,35 | 3 | 11.993.391 | 3 | 11.232.422 | 3 | 11.425.714 | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 9.000.000 | | 9.900.000 | | 9.634.980,38 | | 10.598.478 | | 10.994.478 | |
| Prosentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 350 | 350 | 9.000.000 | 350 | 9.900.000 | 350 | 9.634.980,38 | 350 | 10.598.478 | 350 | 10.994.478 | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 350 | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 6.000.000 | | 6.600.000 | | 6.034.980,38 | | 6.638.478 | | 6.638.478 | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 350 | 350 | 6.000.000 | 350 | 6.600.000 | 350 | 6.034.980,38 | 350 | 6.638.478 | 350 | 6.638.478 | |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 3.000.000 | | 3.300.000 | | 3.600.000 | | 3.960.000 | | 4.356.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 350 | 350 | 3.000.000 | 350 | 3.300.000 | 350 | 3.600.000 | 350 | 3.960.000 | 350 | 4.356.000 | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 64.689.000 | | 65.407.908,66 | | 66.382.696,51 | | 67.737.200,76 | | 69.325.563,75 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 64.689.000 | 100 | 65.407.908,66 | 100 | 66.382.696,51 | 100 | 67.737.200,76 | 100 | 69.325.563,75 | 7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tegalsiwalan |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 64.689.000 | | 65.407.908,66 | | 66.382.696,51 | | 67.737.200,76 | | 69.325.563,75 | |
| Presentase fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketrban umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 14 | 14 | 64.689.000 | 14 | 65.407.908,66 | 14 | 66.382.696,51 | 14 | 67.737.200,76 | 14 | 69.325.563,75 | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 64.689.000 | | 65.407.908,66 | | 66.382.696,51 | | 67.737.200,76 | | 69.325.563,75 | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 14 | 14 | 64.689.000 | 14 | 65.407.908,66 | 14 | 66.382.696,51 | 14 | 67.737.200,76 | 14 | 69.325.563,75 | |
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 36.800.000 | | 37.208.969,66 | | 37.763.502,78 | | 38.534.047,33 | | 39.437.628,43 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 36.800.000 | 100 | 37.208.969,66 | 100 | 37.763.502,78 | 100 | 38.534.047,33 | 100 | 39.437.628,43 | 7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tegalsiwalan |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 36.800.000 | | 37.208.969,66 | | 37.763.502,78 | | 38.534.047,33 | | 39.437.628,43 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1,26 | 1,26 | 36.800.000 | 1,26 | 37.208.969,66 | 1,26 | 37.763.502,78 | 1,26 | 38.534.047,33 | 1,26 | 39.437.628,43 | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 36.800.000 | | 37.208.969,66 | | 37.763.502,78 | | 38.534.047,33 | | 39.437.628,43 | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 1,26 | 1,26 | 36.800.000 | 1,26 | 37.208.969,66 | 1,26 | 37.763.502,78 | 1,26 | 38.534.047,33 | 1,26 | 39.437.628,43 | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 12.000.000 | | 12.133.359,67 | | 12.314.185,69 | | 12.565.450,22 | | 12.860.096,23 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.133.359,67 | 100 | 12.314.185,69 | 100 | 12.565.450,22 | 100 | 12.860.096,23 | 7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tegalsiwalan |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 12.000.000 | | 12.133.359,67 | | 12.314.185,69 | | 12.565.450,22 | | 12.860.096,23 | |
| Peresentase desa / kelurahan yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 12.000.000 | 2 | 12.133.359,67 | 2 | 12.314.185,69 | 2 | 12.565.450,22 | 2 | 12.860.096,23 | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | 6.000.000 | | 6.066.679,83 | | 6.157.092,84 | | 6.282.725,11 | | 6.430.048,12 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.066.679,83 | 2 | 6.157.092,84 | 2 | 6.282.725,11 | 2 | 6.430.048,12 | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 6.000.000 | | 6.066.679,84 | | 6.157.092,85 | | 6.282.725,11 | | 6.430.048,11 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.066.679,84 | 2 | 6.157.092,85 | 2 | 6.282.725,11 | 2 | 6.430.048,11 | |

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas. Penetapannya berlandaskan pada isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kemampuan pendanaan daerah. Secara eksplisit, Program Prioritas Kecamatan Tegalsiwalan dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tegalsiwalan** | | | | |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan public | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | SAE KERJA |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tegalsiwalan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tegalsiwalan**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| | 7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tegalsiwalan | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 91,00 | |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 88,82 | 89,71 | 90,61 | 91,51 | 92,43 | 93,35 | 94,28 | |
| 3. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

***Sumber Data : SIPD Renstra***

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Tegalsiwalan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tegalsiwalan**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1. | 7.01 – KECAMATAN | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | **NIHIL** | | | | | | | |

# BAB V
# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Tegalsiwalan.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Tegalsiwalan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

**a. Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Tegalsiwalan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Tegalsiwalan.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

**b. Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak

lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Tegalsiwalan. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;
2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;
3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

.

CAMAT TEGALSIWALAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN TEGALSIWALAN

**HARIYANTO, S.Sos, M.Si**
Pembina TK. I
NIP. 19710722 200212 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN
PROBOLINGGO

# RENCANA STRATEGIS
# (RENSTRA)

## KECAMATAN TONGAS
## TAHUN 2025-2029

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tongas Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Tongas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Tongas. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tongas. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Tongas dengan Kecamatan dan pemangku kepentingan terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

Tongas, 22 September 2025

CAMAT TONGAS
KABUPATEN PROBOLINGGO

**ROCHMAD WIDIARTO, S.STP, M.A.P.**
Pembina Tingkat I
NIP. 19791017 200012 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 7
1.4 Sistematika Penulisan ..... 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tongas ..... 10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Tongas ..... 17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tongas ..... 20
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 28
2.5 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Kecamatan Tongas .... 28
2.6 Permasalahan dan Isu Stragetis Kecamatan Tongas ..... 30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 33
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tongas Tahun 2025-2029 ..... 33
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tongas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ..... 41
4.1 Uraian Program ..... 41
4.2 Uraian Kegiatan ..... 45
BAB V PENUTUP ..... 77
5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 77
5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..... 78

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ..... 18
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan ..... 19
Tabel 2.2.3 Jumlah Sarana Prasarana ..... 19
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ..... 22
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo (2020-2024) ..... 23
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Tongas ..... 31
Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 36
Tabel 3.1.2 Definisi Operasional IKU Kecamatan Tongas ..... 37
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Tongas ..... 39
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Tongas ..... 40
Tabel 4.1 Program Kecamatan Tongas ..... 43
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tongas ..... 47
Tabel 4.2.1 Definisi Operasional Indikator Program Kecamatan Tongas ..... 59
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tongas ..... 62
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 75
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tongas ..... 76
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tongas ..... 76

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tongas ..... 17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ..... 34
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah ..... 35
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tongas ..... 46

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Tongas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tongas setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Tongas juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Tongas. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Tongas berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Tongas terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tongas yang disusun pada periode Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan resmi Kecamatan Tongas untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Tongas berfungsi mengarahkan pelayanan Kecamatan Tongas dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Renstra Kecamatan Tongas disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan Kecamatan Tongas akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Kecamatan Tongas dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Tongas untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapai dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Kecamatan Tongas berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman resmi bagi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Menyediakan dokumen pedoman yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta pembangunan wilayah melalui perencanaan yang sistematis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TONGAS**

Bab II memuat :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tongas
2.2 Sumber Daya Kecamatan Tongas
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tongas
2.4 Kelompok Sasaran Tongas
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Tongas
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tongas

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III paling sedikit memuat :

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tongas Tahun 2025-2029
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tongas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tongas 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tongas; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tongas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Camat Tongas Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo menyelenggaraan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Tongas Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

**1. CAMAT**

1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
   b. Pelaksanaan pelayanan public ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;

b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI**

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
   b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
   d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;

e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Penyusunan administrasi rencana program / kegiatan / anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
   e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
   g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;

b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan 14ubli penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
   a. Persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
   c. Persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   d. Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi Kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan;

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;
e. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah,

perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;

2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
   b. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
   c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
   d. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, soialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
   e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian;
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Tongas**

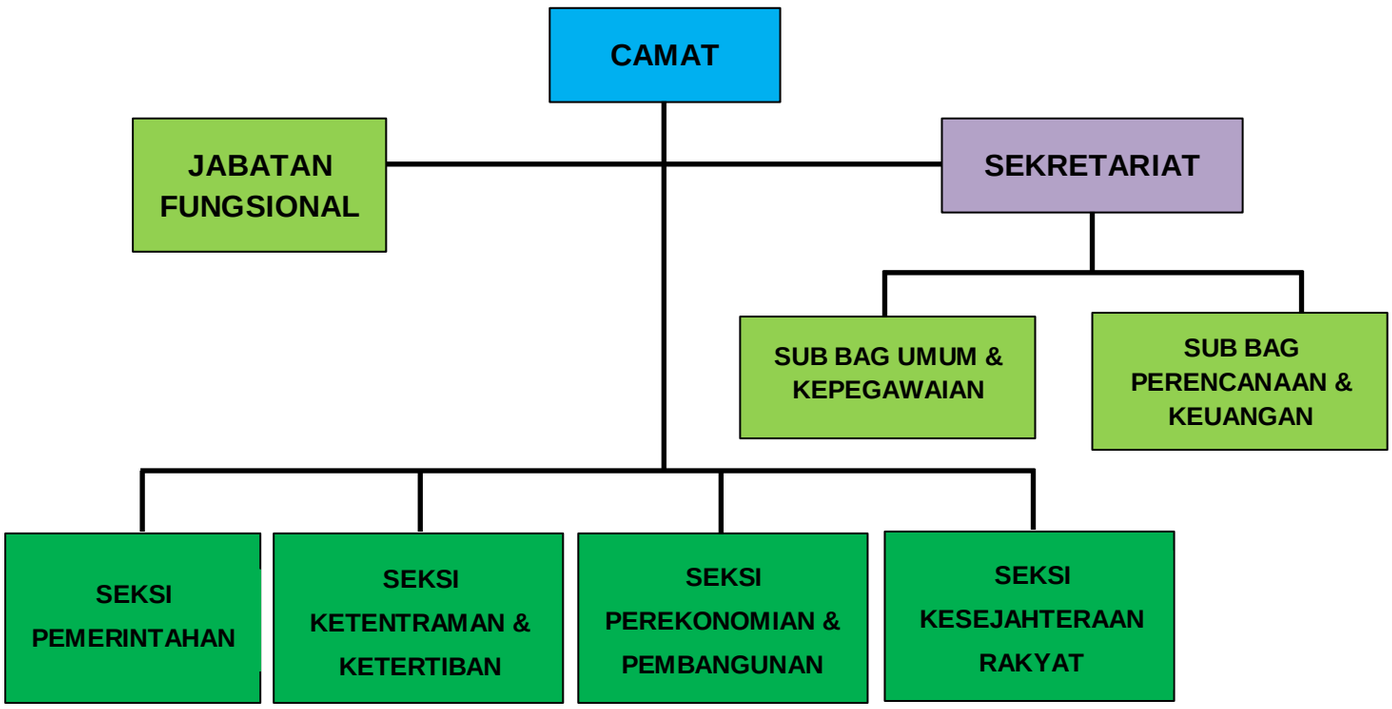


Struktur Organisasi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyatrakat;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tongas

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan, baik berupa sumber daya

manusia, sarana dan prasarana yang masih beroperasional. Permasalahan dan tuntutan Masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Tongas.

Dalam menjalankan pemerintahan dan Pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Tongas sebanyak 17 orang dengan rincian : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak 10 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Jumlah **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak 2 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2 orang. Jumlah **Pegawai Non ASN** sebanyak 5 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Tongas berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| No | Uraian | SD | SLTP | SLTA | Diploma | DIV/S1 | S2/S3 | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | P | |
| 1. | Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 2. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| 4. | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 5. | Seksi Pemerintahan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| 6. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **1** |
| 7. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 8. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | **2** |
| 9. | PPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| 10. | Honorer | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | **5** |
| **Jumlah** | | **0** | **1** | **4** | **0** | **9** | **3** | **13** | **4** | **17** |

*Sumber data: Kecamatan Tongas*

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan**

| No | Uraian | Golongan | | | | | Non ASN | Jml | Eselon | | | Non ASN | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | IX | | | III | IV | Staf | | |
| 1. | Laki-laki | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | **13** | 1 | 2 | 6 | 4 | **13** |
| 2. | Perempuan | - | - | 2 | 1 | - | 1 | **4** | - | 3 | - | 1 | **4** |
| **Jumlah** | | **-** | **4** | **3** | **3** | **2** | **5** | **17** | **1** | **5** | **6** | **5** | **17** |

*Sumber data: Kecamatan Tongas*

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana serta kondisinya yang dimiliki oleh Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.3**

**Jumlah Sarana Prasarana**

| No | Jenis Aset | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak Berat (Unit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portable Generating Set | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Sport Utility Vehicle (SUV) | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Sepeda Motor | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Mesin Absen (Time Recorder) | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Lemari Besi/Metal | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Filing Cabinet Besi | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Brandkas | 1 | 1 | 0 |
| 8 | CCTV – Camera Control Television System | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Alat Penghancur Kertas | 1 | 0 | 1 |
| 10 | LCD Projector/Infocus | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Kursi Besi/Metal | 12 | 7 | 5 |
| 12 | Meja Rapat | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Tempat Tidur Besi | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Meja Podium | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Meja Resepsionis | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Meja Makan Besi | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Kursi Rapat | 36 | 36 | 0 |
| 18 | Kursi Tamu | 3 | 3 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Mesin Pemotong Rumput | 1 | 1 | 0 |
| 20 | A.C. Window | 4 | 4 | 0 |
| 21 | A.C. Unit | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Kipas Angin | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Televisi | 3 | 2 | 1 |
| 24 | Sound System | 4 | 2 | 2 |
| 25 | Meja Rapat Pejabat Eselon III | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Kursi Kerja | 2 | 2 | 0 |
| 28 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Layar Film/Projector | 1 | 1 | 0 |
| 31 | P.C Unit | 6 | 2 | 4 |
| 32 | Lap Top | 14 | 8 | 6 |
| 33 | Note Book | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 20 | 10 | 10 |
| 35 | Printer | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Hard disk Eksternal | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Genset | 1 | 0 | 1 |

*Sumber data: Kecamatan Tongas*

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tongas

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tongas yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Tongas telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapaun capaian kinerja Kecamatan Tongas dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2024 – 2026 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Probolinggo pada periode sekarang, yaitu tahun 2025 – 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing)".*** Adapun pengertian Visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Probolinggo berkomitmen mewujudkan Visi sebagai Daerah yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong pembangunan ekonomi yang merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran secara adil. Selain itu, program-program pelestarian alam digalakkan untuk memastikan

pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur dan akhlak mulia juga ditanamkan melalui pendidikan dan budaya untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh kabupaten yang maju dan bermartabat. Semua upaya ini dilakukan demi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo merumuskan misi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Periode 2025 – 2029, sebagai berikut:

**Misi 1 : SAE PEMERINTAHAN (Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif, Dan Inovatif)**

**Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**

Tujuan pertama ini terdiri dari satu sasaran yakni **Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif** dengan indikator sasaran berupa **Indeks kepuasan Masyarakat**.

Target dan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran 21ubli 2.3.1 sebagai berikut :

## Tabel 2.3.1

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | Persentase pelayanan 22ublic yang dilaksanakan secara berkualitas | % | | | | - | - | 100 | 73 | 100 | - | - | 97,70 | 88,20 | 94,40 | - | - | 97,70 | 120,82 | 94,40 |
| 2 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 96,10 | 100 | 99,00 | - | - | 96,10 | 100,00 | 99,00 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah Diberdayakan | % | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 92,70 | 64,28 | 90,40 | - | - | 92,70 | 64,28 | 90,40 |
| 4 | Persentase desa/kelurahan yang telah dibina | % | | | | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - | - | 90,00 |
| 5 | Nilai SAKIP PD Kecamatan | Nilai | | | | - | - | 80 | 80 | 74 | - | - | 73,01 | 73,01 | 73,31 | - | - | 91,26 | 91,26 | 99,07 |

*Sumber data : Kecamatan Tongas*

Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifkasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo (2020-2024)**

| Uraian Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | **2.649.589.596,00** | **2.447.708.912,00** | **2.356.867.551,00** | **-** | **-** | **2.442.505.014,00** | **2.217.310.732,00** | **2.108.467.904,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **92,18** | **90,59** | **89,46** | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 14.549.000,00 | 3.600.000,00 | 8.520.000,00 | - | - | 10.660.000,00 | 2.362.500,00 | 8.520.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 73,27 | 65,63 | 100,00 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 6.249.000,00 | 900.000 | 900.000,00 | | | 6.060.000,00 | 787.500,00 | 900.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96,98 | 87,50 | 100,00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | 1.100.000,00 | 900.000 | 900.000,00 | | | 800.000,00 | 787.500,00 | 900.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 72,73 | 87,50 | 100,00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | 1.100.000,00 | 900.000 | 900.000,00 | | | 800.000,00 | 0 | 900.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 72,73 | 0,00 | 100,00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | 1.300.000,00 | 0 | 1.200.000,00 | | | 1.000.000,00 | 0 | 1.200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 76,92 | #DIV/0! | 100,00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | 1.100.000,00 | 900.000 | 900.000,00 | | | 800.000,00 | 787.500,00 | 900.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 72,73 | 87,50 | 100,00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | 1.300.000,00 | 0 | 1.200.000,00 | | | 0 | 0 | 1.200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 100,00 | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 2.400.000,00 | 0 | 2.520.000,00 | | | 1.200.000,00 | 0 | 2.520.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50,00 | #DIV/0! | 100,00 | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.296.205.000,00 | 2.131.380.416,00 | 1.985.149.000,00 | - | - | 2.133.183.985,00 | 1.954.493.422,00 | 1.749.683.885,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92,90 | 91,70 | 88,14 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | 2.267.695.000,00 | 2.119.776.416 | 1.943.499.000,00 | - | - | 2.130.453.985,00 | 1.952.189.422,00 | 1.708.113.885,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,95 | 92,09 | 87,89 | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | 12.300.000,00 | 6.804.000 | 33.250.000,00 | - | - | 2.730.000,00 | 2.304.000,00 | 33.170.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 22,20 | 33,86 | 99,76 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | 2.400.000,00 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | - | - | 0 | 0 | 1.200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | 2.910.000,00 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | - | - | 0 | 0 | 1.800.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | - | 4.630.000,00 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | - | - | 0 | 0 | 1.800.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | 2.860.000,00 | 0 | 1.800.000,00 | - | - | 0 | 0 | 1.800.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 100,00 | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | 3.410.000,00 | 0 | 1.800.000,00 | - | - | 0 | 0 | 1.800.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 100,00 | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 36.965.775,00 | 33.440.025,00 | 53.601.000,00 | - | - | 25.016.884,00 | 20.452.500,00 | 53.443.318,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 67,68 | 61,16 | 99,71 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | 2.440.700,00 | 2.323.000 | 2.949.000,00 | - | - | 2.180.000,00 | 650.000,00 | 2.944.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 89,32 | 27,98 | 99,83 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 11.359.875,00 | 10.021.425 | 15.468.400,00 | - | - | 10.147.000,00 | 3.032.500,00 | 15.394.900,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 89,32 | 30,26 | 99,52 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | 4.510.800,00 | 2.585.600 | 3.427.000,00 | - | - | 4.199.800,00 | 0 | 3.424.400,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93,11 | 0,00 | 99,92 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | - | 12.000.000,00 | 12.000.000 | 19.950.000,00 | - | - | 8.490.084,00 | 11.370.000,00 | 19.920.018,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 70,75 | 94,75 | 99,85 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | - | 600.000,00 | 600.000 | 4.246.600,00 | - | - | 0 | 0 | 4.200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 98,90 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | 6.054.400,00 | 5.910.000 | 7.560.000,00 | - | - | 0 | 5.400.000,00 | 7.560.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 91,37 | 100,00 | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 13.596.000,00 | 42.806.000,00 | 58.916.000,00 | - | - | 10.200.000,00 | 38.820.000,00 | 58.435.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 75,02 | 90,69 | 99,18 | | |
| Pengadaan Mebel | - | - | 5.200.000 | 3.686.000 | 18.970.000,00 | - | - | 4.200.000,00 | - | 18.810.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80,77 | 0,00 | 99,16 | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 8.396.000 | 39.120.000 | 39.946.000,00 | - | - | 6.000.000,00 | 38.820.000,00 | 39.625.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 71,46 | 99,23 | 99,20 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 235.563.821,00 | 190.632.471,00 | 195.631.551,00 | - | - | 216.612.645,00 | 175.253.810,00 | 183.478.659,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91,95 | 91,93 | 93,79 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | 1.000.000,00 | 510.000 | - | - | - | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | 40.305.525,00 | 34.805.775 | 55.790.300,00 | | - | 27.666.477,00 | 23.673.859,00 | 53.671.731,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 68,64 | 68,02 | 96,20 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 2.440.000,00 | 1.838.400 | 9.398.000,00 | | - | 1.200.000,00 | 1.170.000,00 | 9.390.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 49,18 | 63,64 | 99,91 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | 191.818.296,00 | 153.478.296 | 130.443.251,00 | | - | 187.746.168,00 | 150.409.951,00 | 120.416.928,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,88 | 98,00 | 92,31 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 52.710.000,00 | 45.850.000,00 | 55.050.000,00 | - | - | 46.831.500,00 | 25.928.500,00 | 54.907.042,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 88,85 | 56,55 | 99,74 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | 25.000.000,00 | 24.600.000,00 | 23.800.000,00 | | - | 19.431.500,00 | 7.678.500,00 | 23.657.042,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 77,73 | 31,21 | 99,40 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | 27.710.000,00 | 21.250.000,00 | 31.250.000,00 | | - | 27.400.000,00 | 18.250.000,00 | 31.250.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,88 | 85,88 | 100,00 | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | **83.241.000,00** | **82.700.000,00** | **73.715.740,00** | **-** | **-** | **81.240.000,00** | **77.280.000,00** | **67.826.905,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **97,60** | **93,45** | **92,01** | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 57.040.000,00 | 58.700.000,00 | 58.180.000,00 | - | - | 55.740.000,00 | 54.480.000,00 | 52.293.405,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,72 | 92,81 | 89,88 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | - | 57.040.000,00 | 58.700.000,00 | 58.180.000,00 | - | - | 55.740.000,00 | 54.480.000,00 | 52.293.405,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,72 | 92,81 | 89,88 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 26.201.000,00 | 24.000.000,00 | 15.535.740,00 | - | - | 25.500.000,00 | 22.800.000,00 | 15.533.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,32 | 95,00 | 99,99 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | - | - | 26.201.000,00 | 24.000.000,00 | 15.535.740,00 | - | - | 25.500.000,00 | 22.800.000,00 | 15.533.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,32 | 95,00 | 99,99 | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | **215.797.800,00** | **421.515.800,00** | **81.554.000,00** | **-** | **-** | **200.237.839,00** | **389.100.000,00** | **81.551.300,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **92,79** | **92,31** | **100,00** | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 215.797.800,00 | 371.515.800,00 | 28.354.000,00 | - | - | 200.237.839,00 | 352.230.000,00 | 28.352.700,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92,79 | 94,81 | 100,00 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | 18.147.800,00 | 18.178.500,00 | 10.984.000,00 | - | - | 18.045.000,00 | 12.730.000,00 | 10.983.300,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,43 | 70,03 | 99,99 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | - | 173.650.000,00 | 353.337.300,00 | 17.370.000,00 | - | - | 159.171.000,00 | 339.500.000,00 | 17.369.400,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91,66 | 96,08 | 100,00 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | - | 24.000.000,00 | - | - | | | 23.021.839,00 | - | - | | | | #DIV/0! | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 36.870.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 73,74 | #DIV/0! | | |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 36.870.000,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 73,74 | #DIV/0! | | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | 53.200.000,00 | - | - | - | - | 53.198.600,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | | |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | - | 32.000.000,00 | - | - | - | - | 31.998.800,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | | |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 21.200.000,00 | | | | | 21.199.800,00 | | | | | 100,00 | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | **77.687.000,00** | **39.220.000,00** | **41.200.000,00** | **-** | **-** | **74.700.000,00** | **26.340.000,00** | **41.200.000,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **96,16** | **67,16** | **100,00** | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 77.687.000,00 | 39.220.000,00 | 41.200.000,00 | - | - | 74.700.000,00 | 26.340.000,00 | 41.200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96,16 | 67,16 | 100,00 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | 48.600.000,00 | 31.500.000,00 | 31.600.000,00 | - | - | 45.900.000,00 | 19.500.000,00 | 31.600.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 94,44 | 61,90 | 100,00 | | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | 29.087.000,00 | 7.720.000,00 | 9.600.000,00 | - | - | 28.800.000,00 | 6.840.000,00 | 9.600.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,01 | 88,60 | 100,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | **31.187.900,00** | **28.800.000,00** | **27.800.000,00** | **-** | **-** | **30.000.000,00** | **19.320.000,00** | **27.799.500,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **96,19** | **67,08** | **100,00** | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 31.187.900,00 | 28.800.000,00 | 27.800.000,00 | - | - | 30.000.000,00 | 19.320.000,00 | 27.799.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96,19 | 67,08 | 100,00 | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | - | 31.187.900,00 | 28.800.000,00 | 27.800.000,00 | - | - | 30.000.000,00 | 19.320.000,00 | 27.799.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96,19 | 67,08 | 100,00 | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50.088.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50.085.800,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **100,00** | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | - | - | 50.088.000,00 | - | - | - | - | 50.085.800,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | | |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | - | - | - | 9.496.000,00 | - | - | - | - | 9.495.200,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,99 | | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | - | - | - | - | 23.896.000,00 | - | - | - | - | 23.895.800,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | - | - | - | - | 16.696.000,00 | - | - | - | - | 16.694.800,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,99 | | |
| **Jumlah** | **-** | **-** | **3.057.503.296,00** | **3.019.944.712,00** | **2.631.225.291,00** | **-** | **-** | **2.828.682.853,00** | **2.729.350.732,00** | **2.376.931.409,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **92,52** | **90,38** | **90,34** | | |

*Sumber data : Kecamatan Tongas*

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran wilayah Kecamatan Tongas :

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tongas

Pengembangan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses ini tak lepas dari berbagai tantangan dan juga membuka banyak peluang.

Terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan :

- **Keterbatasan Sumber Daya** : Banyak kecamatan menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini bisa menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan.
- **Kompetensi Aparatur** : Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap standar pelayanan, prosedur, dan etika profesi.

- **Birokrasi yang Kaku** : Sistem birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat. Ini bisa memperlambat proses pelayanan dan menciptakan celah bagi praktik pungutan liar atau korupsi.
- **Akses dan Kesenjangan Digital** : Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pelayanan berbasis digital (e-government), terutama di daerah terpencil.
- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah** : Kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat bisa membuat program pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga menyulitkan pemerintah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan yang ada cukup besar, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan publik :

- **Pemanfaatan Teknologi Digital** : Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Contohnya adalah pembuatan aplikasi pelayanan online, sistem pengaduan terpadu, dan penggunaan data untuk analisis kebutuhan masyarakat.
- **Kolaborasi Antar-Sektor** : Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah kerjasama dalam program pelatihan, penyediaan fasilitas, atau pengembangan aplikasi bersama.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur** : Investasi pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan pemahaman mengenai pelayanan prima.
- **Membangun Sistem Informasi Terpadu** : Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (SIM) memungkinkan data dari berbagai unit layanan dapat diakses dengan mudah. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat** : Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui forum musyawarah atau platform pengaduan yang responsif, dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sambil memanfaatkan setiap peluang, kecamatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tongas

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal;
3. Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi;
4. Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan pelayanan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Tongas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya;
3. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin;
4. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya.

**Tabel 2.6**

**Isu Strategis Kecamatan Tongas**

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan Perangkat Daerah | Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah | Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD | | | Isu Strategis Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, seperti dari kawasan pesisir | Penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan masih belum optimal | Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah | Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | | Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal | | | | |
| | Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan belum berjalan secara maksimal | Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim | | | | Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumberdaya |
| | | Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal | | | | |
| Potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta pariwisata berbasis alam | Angka kemiskinan dan ketergantungan sosial masih tergolong tinggi | Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah | Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. | Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan | Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin |

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan Perangkat Daerah | Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah | Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD | | | Isu Strategis Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan | |
| | Kualitas tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat optimal | Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal | Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan. | Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. | Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif |
| Potensi Sumberdaya Manusia | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah | | Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat. | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya |

*Sumber data : Kecamatan Tongas*

# BAB III

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, Misi menjadi strategi pencapaiannya, Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan Sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tongas Tahun 2025-2029

### A. Tujuan Renstra Kecamatan Tongas Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran Pembangunan Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun Daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu: ***"SAE PEMERINTAHAN : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tongas, dalam hal ini Kecamatan Tongas diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang

tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

## B. Sasaran Renstra Kecamatan Tongas Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah;***
2. ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"***.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

**Gambar 3.1**

**Konsep Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo**

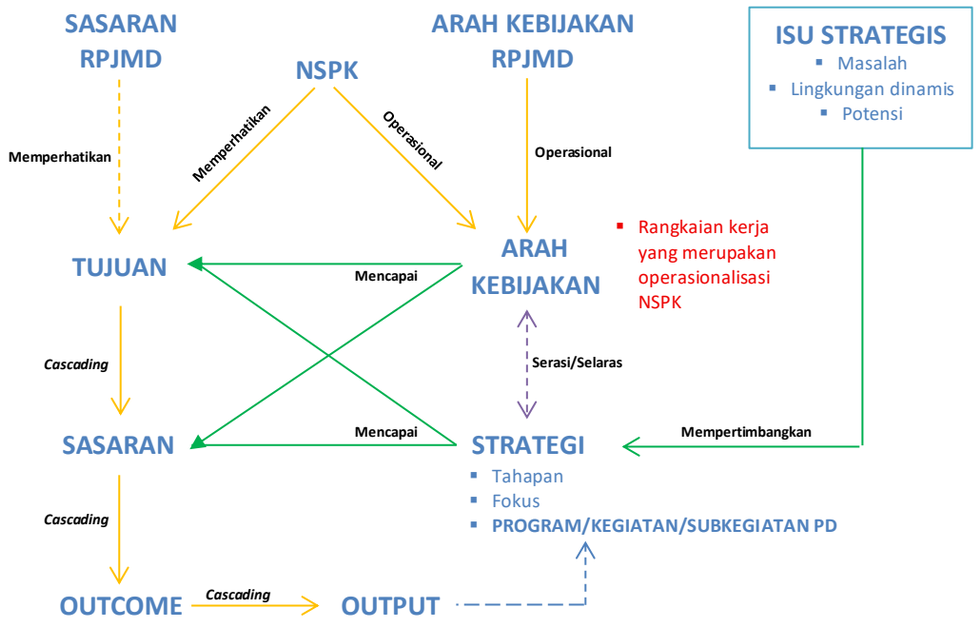


RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun) yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan,** dan **Program Prioritas**. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun

oleh Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana Pembangunan Daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja)

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.2**

**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**

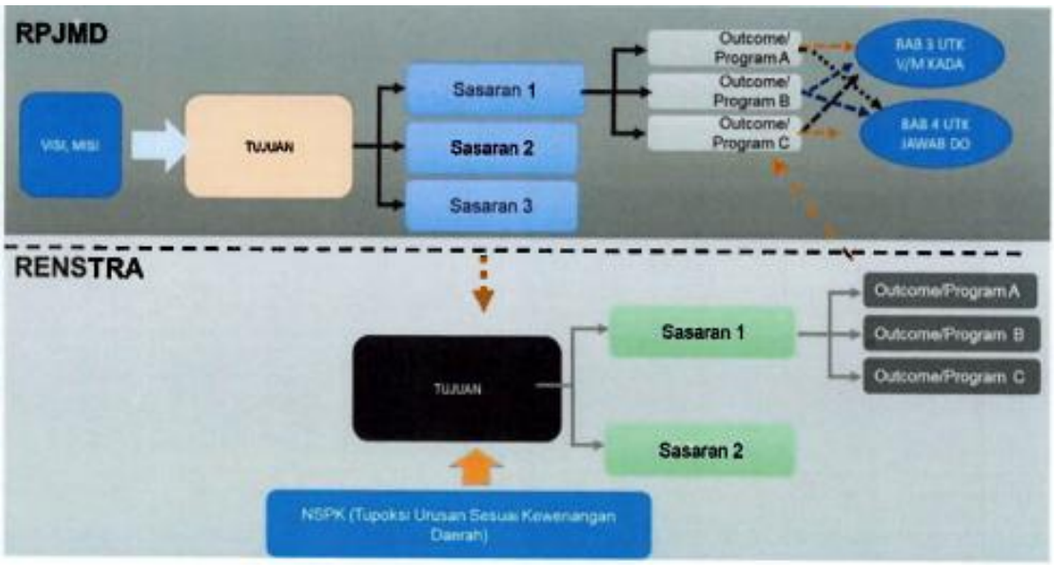


Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo adalah tahapan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolok ukur Capaian Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.1**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tongas**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Tongas** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,75 | 87,5 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 | 91 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | 91,39 | 92,3 | 93,23 | 94,16 | 95,1 | 96,05 | 97,01 | |

*Sumber data: SIPD Renstra Kecamatan Tongas*

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, yang mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta Program Pembangunan.

Untuk mewujudkan **Visi**, diperlukan **Misi**, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam mencapai Visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi kemudian dijabarkan ke dalam **Strategi Pembangunan**, yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang harus dihadapi. Strategi juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Strategi Pembangunan diterjemahkan ke dalam **Arah Kebijakan**, yaitu pedoman yang lebih konkret berupa kebijakan dan program

kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan dan langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## C. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tongas

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah deskripsi yang sangat spesifik dan terperinci tentang bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan pengukuran konsisten, akurat, dan dapat direplikasi oleh siapa pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan menjamin setiap orang memahami indikator dengan cara yang sama.

**Tabel 3.1.2**

**Definisi Operasional IKU Kecamatan Tongas**

| No | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengolahan data dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh Masyarakat | Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut :<br>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 2. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik yang berkualitas adalah Pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, cepat, responsif, ramah, dan memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana berkualitas dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai hasil atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) | Nilai LHE AKIP tahun (n) - (n-1) ——————————— X 100<br>Nilai LHE AKIP tahun (n-1)<br><br>Keterangan :<br>n : Nilai AKIP tahun berjalan<br>n-1 : Nilai AKIP tahun sebelumnya |

*Sumber data : Cascading Kecamatan Tongas*

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tongas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### A. Strategi Kecamatan Tongas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam Pembangunan Daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Strategi Pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Strategi Pembangunan memperhitungkan berbagai faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor Internal mencakup Sumber Daya Manusia, Kapasitas Fiskal Daerah, Kebijakan Daerah, serta Potensi Unggulan yang dimiliki. Sementara itu, Faktor Eksternal meliputi Kebijakan Nasional, Perkembangan Ekonomi Regional, Kondisi Sosial, serta Tantangan Global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan, Program, dan Langkah-langkah Implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, Strategi Pembangunan Daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo secara efektif dan berkelanjutan.

## B. Penahapan Pembangunan Kecamatan Tongas

Tahapan-tahapan yang digariskan dalam Renstra ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan. Penahapan Renstra Kecamatan Tongas dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Kecamatan Tongas**

| TAHAP (2026) | TAHAP (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP (2029) | TAHAP (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan Pelayanan Publik yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing. | Percepatan penguatan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi | Pemantapan pelayanan Publik yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. | Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan |

*Sumber data : Kecamatan Tongas*

## C. Lokasi Fokus (Lokus) Renstra Kecamatan Tongas

Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) dalam Renstra Kecamatan Tongas sangat penting untuk menunjukkan di mana Program, Kegiatan, atau Intervensi Strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Tongas :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

## D. Arah Kebijakan Kecamatan Tongas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Tongas, sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Arah Kebijakan Kecamatan Tongas**

| NO | MISI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE PEMERINTAHAN) | Penyediaan SDM yang unggul, berdaya saing dan berintigritas tinggi dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang unggul; | 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik;<br>2. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik;<br>3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan;<br>4. Pengembangan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat;<br>5. Koordinasi dan Supervisi Terpadu. | |

*Sumber data : Kecamatan Tongas*

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ditentukanlah Program dan Kegiatan. Adapun Program yang dimiliki Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan public secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada Masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dassar Masyarakat melalui layanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan Pembangunan jangka menengah (RPJMD).

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan keamanan Masyarakat melalui koordinasi berbagai pihak seperti instansi pemerintah, apparat penegak hukum (TNI/Polri), tokoh agama, dan tokoh Masyarakat.

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum merupakan program mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan di daerah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui asas dekonsentrasi. Program ini memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dan sering dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopomda) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan urusan umum yang bersifat multimensional.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Program Pmebinaan dan pengawasan Pemerintaah Desa dan Kelurahan merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini Adalah bagian dari urusan pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintah desa.

Program Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1**

## Program Kecamatan Tongas

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 2.670.982.465,85 | | 2.700.665.911,55 | | 2.740.914.504,96 | | 2.796.841.433,81 | | 2.862.424.294,68 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.594.182.465,85 | | 2.623.012.409,66 | | 2.662.103.716,56 | | 2.716.422.552,42 | | 2.780.119.678,82 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 73,31 | 73,35 | 73,38 | 2.594.182.465,85 | 73,42 | 2.623.012.409,66 | 73,46 | 2.662.103.716,56 | 73,49 | 2.716.422.552,42 | 73,53 | 2.780.119.678,82 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 7.200.000 | | 7.280.015,8 | | 7.388.511,41 | | 7.539.270,13 | | 7.716.057,74 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 100 | 7.200.000 | 100 | 7.280.015,8 | 100 | 7.388.511,41 | 100 | 7.539.270,13 | 100 | 7.716.057,74 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 25.800.000 | | 26.086.723,3 | | 26.475.499,23 | | 27.015.717,97 | | 27.649.206,89 | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 100 | 25.800.000 | 100 | 26.086.723,3 | 100 | 26.475.499,23 | 100 | 27.015.717,97 | 100 | 27.649.206,89 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 9.600.000 | | 9.706.687,74 | | 9.851.348,55 | | 10.052.360,17 | | 10.288.076,98 | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 100 | 9.600.000 | 100 | 9.706.687,74 | 100 | 9.851.348,55 | 100 | 10.052.360,17 | 100 | 10.288.076,98 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 9.000.000 | | 9.100.019,75 | | 9.235.639,26 | | 9.424.087,66 | | 9.645.072,17 | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 100 | 9.000.000 | 100 | 9.100.019,75 | 100 | 9.235.639,26 | 100 | 9.424.087,66 | 100 | 9.645.072,17 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 25.200.000 | | 25.480.055,3 | | 25.859.789,95 | | 26.387.445,46 | | 27.006.202,08 | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 25.200.000 | 100 | 25.480.055,3 | 100 | 25.859.789,95 | 100 | 26.387.445,46 | 100 | 27.006.202,08 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | | **2.670.982.465,85** | | **2.700.665.911,55** | | **2.740.914.504,96** | | **2.796.841.433,81** | | **2.862.424.294,68** | |

*Sumber data : SIPD Renstra Kecamatan Tongas*

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan Pemerintahan. Kegiatan berada di antara Program dan Kegiatan dalam struktur Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
13. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
15. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur sistematis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan Tujuan dan Sasaran strategis ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 4.1**

**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sun Kegiatan Renstra Kecamatan Tongas**

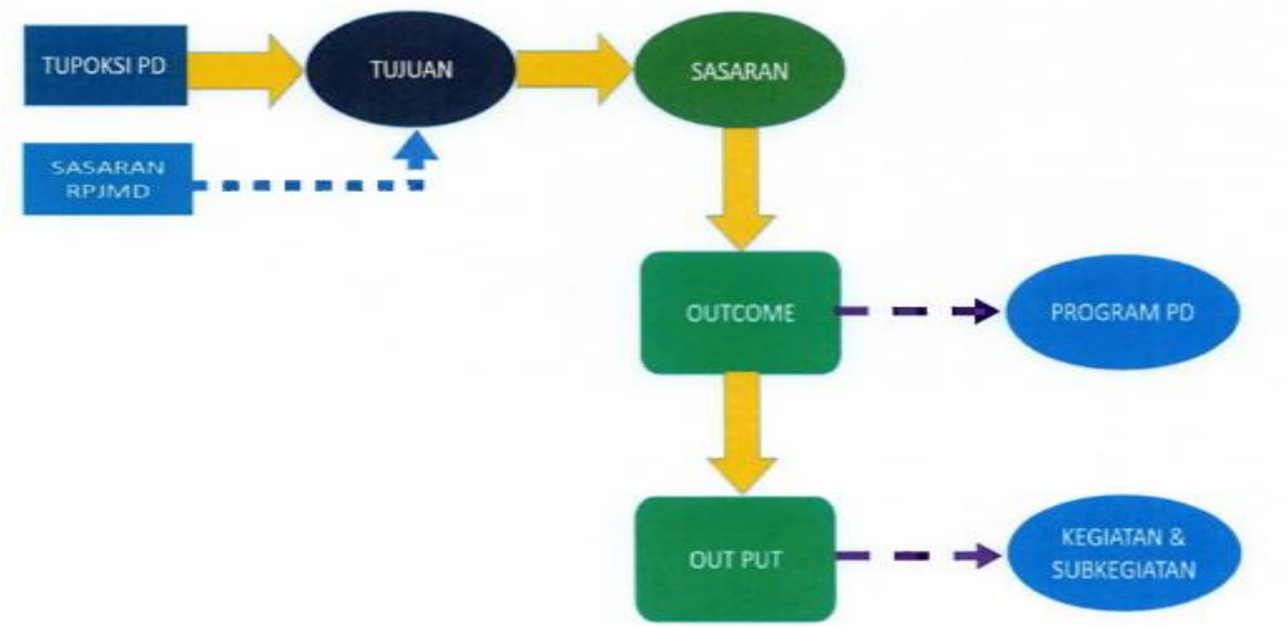

## Tabel 4.2

## Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecaman Tongas

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Tongas** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif | | | | Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | | | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan (Indeks) | | |
| | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | | | | | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| | | | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | |
| | | | | | Prosentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |
| | | | | Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |
| | | | | | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | |
| | | | | terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat fasilitasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

*Sumber data : SIPD Renstra Kecamatan Tongas*

Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan adalah panduan rinci yang menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu indikator akan diukur. Ini berfungsi sebagai "kamus" yang memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses pengukuran dan evaluasi akan menggunakan standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2.1**

**Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Tongas**

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasional | Formula Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk tahun n | Nilai LHE AKIP yang dikeluarkan tahun n |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibagi dengan Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai waktu yang dijadwalkan | Laporan Keuangan yang tersusun dibagi dengan Target Laporan Keuangan yang harus disusun dalam 1 tahun |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Persentase Adminsitrasi Umum yang dilaksanakan | Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi dibagi total bulan dalam satu tahun dikali 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Berdasarkan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | Total Pengadaan Barang dibagi Rencana Pengadaan Barang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berdasarkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dalam satu tahun | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dibagi total Jumlah bulan dalam satu tahun |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Berdasarkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik selama satu tahun | Total Pemeliharaan Barang dibagi Rencana Pemeliharaan Barang dalam satu tahun |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standart | Berdasarkan Persentase Dokumen Pelayanan sesuai Standart yang dilaksanakan di Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi dengan seluruh Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kecamatan |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terlaksana dibagi seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Berdasarkan realisasi PAD sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) | Realisasi PAD dibagi Target PAD dalam satu tahun sesuai SPPT |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan Baik | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | |

*Sumber data : Cascading Kecamatan Tongas*

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan Indikator Kinerja, Target Tahunan, dan Estimasi Kebutuhan Pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Perangkat Daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

## Tabel 4.3

## Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tongas

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 7.01 KECAMATAN | | | | 2.670.982.465,85 | | 2.700.665.911,55 | | 2.740.914.504,96 | | 2.796.841.433,81 | | 2.862.424.294,68 | | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.594.182.465,85 | | 2.623.012.409,66 | | 2.662.103.716,56 | | 2.716.422.552,42 | | 2.780.119.678,82 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 73,31 | 73,38 | 2.594.182.465,85 | 73,42 | 2.623.012.409,66 | 73,46 | 2.662.103.716,56 | 73,49 | 2.716.422.552,42 | 73,53 | 2.780.119.678,82 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Tongas | |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 13.200.000 | | 13.332.000 | | 13.465.320 | | 13.599.973,2 | | 13.735.972,93 | | |
| Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | 20 | 13.200.000 | 20 | 13.332.000 | 20 | 13.465.320 | 20 | 13.599.973,2 | 20 | 13.735.972,93 | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7.200.000 | | 7.272.000 | | 7.344.720 | | 7.418.167,2 | | 7.492.348,87 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | 7 | 7.200.000 | 7 | 7.272.000 | 7 | 7.344.720 | 7 | 7.418.167,2 | 7 | 7.492.348,87 | | |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 6.000.000 | | 6.060.000 | | 6.120.600 | | 6.181.806 | | 6.243.624,06 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 8 | 8 | 6.000.000 | 8 | 6.060.000 | 8 | 6.120.600 | 8 | 6.181.806 | 8 | 6.243.624,06 | | |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.213.401.972 | | 2.238.424.110,72 | | 2.273.669.533,83 | | 2.324.104.027,17 | | 2.383.877.967,44 | | |
| Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 20 | 15 | 2.213.401.972 | 15 | 2.238.424.110,72 | 15 | 2.273.669.533,83 | 15 | 2.324.104.027,17 | 15 | 2.383.877.967,44 | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.180.801.972 | | 2.205.498.110,72 | | 2.240.414.273,83 | | 2.290.516.214,57 | | 2.349.954.276,71 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 20 | 15 | 2.180.801.972 | 15 | 2.205.498.110,72 | 15 | 2.240.414.273,83 | 15 | 2.290.516.214,57 | 15 | 2.349.954.276,71 | | |
| 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 24.600.000 | | 24.846.000 | | 25.094.460 | | 25.345.404,6 | | 25.598.858,65 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 24.600.000 | 12 | 24.846.000 | 12 | 25.094.460 | 12 | 25.345.404,6 | 12 | 25.598.858,65 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 8.000.000 | | 8.080.000 | | 8.160.800 | | 8.242.408 | | 8.324.832,08 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 5 | 8.000.000 | 5 | 8.080.000 | 5 | 8.160.800 | 5 | 8.242.408 | 5 | 8.324.832,08 | | |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | | |
| 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 85.711.600 | | 86.568.716 | | 87.434.403,16 | | 88.308.747,19 | | 89.191.834,66 | | |
| Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 1 | 85.711.600 | 1 | 86.568.716 | 1 | 87.434.403,16 | 1 | 88.308.747,19 | 1 | 89.191.834,66 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 85.711.600 | | 86.568.716 | | 87.434.403,16 | | 88.308.747,19 | | 89.191.834,66 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 2 | 85.711.600 | 2 | 86.568.716 | 2 | 87.434.403,16 | 2 | 88.308.747,19 | 2 | 89.191.834,66 | | |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 48.524.000 | | 49.009.240 | | 49.499.332,4 | | 49.994.325,72 | | 50.494.268,98 | | |
| Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | 20 | 48.524.000 | 20 | 49.009.240 | 20 | 49.499.332,4 | 20 | 49.994.325,72 | 20 | 50.494.268,98 | | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 13.920.000 | | 14.059.200 | | 14.199.792 | | 14.341.789,92 | | 14.485.207,82 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | 20 | 13.920.000 | 20 | 14.059.200 | 20 | 14.199.792 | 20 | 14.341.789,92 | 20 | 14.485.207,82 | | |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 34.604.000 | | 34.950.040 | | 35.299.540,4 | | 35.652.535,8 | | 36.009.061,16 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 6 | 34.604.000 | 6 | 34.950.040 | 6 | 35.299.540,4 | 6 | 35.652.535,8 | 6 | 36.009.061,16 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 183.420.494 | | 185.254.698,94 | | 187.107.245,93 | | 188.978.318,39 | | 190.868.101,57 | | |
| Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 4 | 183.420.494 | 4 | 185.254.698,94 | 4 | 187.107.245,93 | 4 | 188.978.318,39 | 4 | 190.868.101,57 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 44.530.550 | | 44.975.855,5 | | 45.425.614,06 | | 45.879.870,2 | | 46.338.668,9 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 44.530.550 | 12 | 44.975.855,5 | 12 | 45.425.614,06 | 12 | 45.879.870,2 | 12 | 46.338.668,9 | | |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 8.240.000 | | 8.322.400 | | 8.405.624 | | 8.489.680,24 | | 8.574.577,04 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 4 | 8.240.000 | 4 | 8.322.400 | 4 | 8.405.624 | 4 | 8.489.680,24 | 4 | 8.574.577,04 | | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 130.649.944 | | 131.956.443,44 | | 133.276.007,87 | | 134.608.767,95 | | 135.954.855,63 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 130.649.944 | 12 | 131.956.443,44 | 12 | 133.276.007,87 | 12 | 134.608.767,95 | 12 | 135.954.855,63 | | |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 49.924.399,85 | | 50.423.644 | | 50.927.881,24 | | 51.437.160,75 | | 51.951.533,24 | | |
| Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 49.924.399,85 | 1 | 50.423.644 | 1 | 50.927.881,24 | 1 | 51.437.160,75 | 1 | 51.951.533,24 | | |
| | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 20.000.000 | | 20.200.000 | | 20.402.000 | | 20.606.020 | | 20.812.081,08 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 9 | 20.000.000 | 9 | 20.200.000 | 9 | 20.402.000 | 9 | 20.606.020 | 9 | 20.812.081,08 | | |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 29.924.399,85 | | 30.223.644 | | 30.525.881,24 | | 30.831.140,75 | | 31.139.452,16 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 29.924.399,85 | 1 | 30.223.644 | 1 | 30.525.881,24 | 1 | 30.831.140,75 | 1 | 31.139.452,16 | | |
| 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 7.200.000 | | 7.280.015,8 | | 7.388.511,41 | | 7.539.270,13 | | 7.716.057,74 | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Prosentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%) | 100 | 100 | 7.200.000 | 100 | 7.280.015,8 | 100 | 7.388.511,41 | 100 | 7.539.270,13 | 100 | 7.716.057,74 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Tongas | |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 3.600.000 | | 3.640.015,8 | | 3.669.511,41 | | 3.769.635,13 | | 3.858.057,74 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 3 | 9 | 3.600.000 | 9 | 3.640.015,8 | 9 | 3.669.511,41 | 9 | 3.769.635,13 | 9 | 3.858.057,74 | | |
| | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 3.600.000 | | 3.640.015,8 | | 3.669.511,41 | | 3.769.635,13 | | 3.858.057,74 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 3 | 9 | 3.600.000 | 9 | 3.640.015,8 | 9 | 3.669.511,41 | 9 | 3.769.635,13 | 9 | 3.858.057,74 | | |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 3.600.000 | | 3.640.000 | | 3.719.000 | | 3.769.635 | | 3.858.000 | | |
| Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | 3.600.000 | 6 | 3.640.000 | 6 | 3.719.000 | 6 | 3.769.635 | 6 | 3.858.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 4 | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | | |
| 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | 3.600.000 | | 3.640.000 | | 3.719.000 | | 3.769.635 | | 3.858.000 | | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 4 | 14 | 3.600.000 | 14 | 3.640.000 | 14 | 3.719.000 | 14 | 3.769.635 | 14 | 3.858.000 | | |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 25.800.000 | | 26.086.723,3 | | 26.475.499,23 | | 27.015.717,97 | | 27.649.206,89 | | |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan | Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%) | 100 | 100 | 25.800.000 | 100 | 26.086.723,3 | 100 | 26.475.499,23 | 100 | 27.015.717,97 | 100 | 27.649.206,89 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Tongas | |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 15.800.000 | | 15.986.723,3 | | 16.275.499,23 | | 16.615.717,97 | | 17.049.206,89 | | |
| Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 2 | 3 | 15.800.000 | 3 | 15.986.723,3 | 3 | 16.275.499,23 | 3 | 16.615.717,97 | 3 | 17.049.206,89 | | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 3.000.000 | | 3.100.000 | | 3.200.000 | | 3.400.000 | | 3.600.000 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.100.000 | 8 | 3.200.000 | 8 | 3.400.000 | 8 | 3.600.000 | | |
| 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 12.800.000 | | 12.886.723,3 | | 13.075.499,23 | | 13.215.717,97 | | 13.449.206,89 | | |
| Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 2 | 3 | 12.800.000 | 3 | 12.886.723,3 | 3 | 13.075.499,23 | 3 | 13.215.717,97 | 3 | 13.449.206,89 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 10.000.000 | | 10.100.000 | | 10.200.000 | | 10.400.000 | | 10.600.000 | | |
| Prosentase Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan baik | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 14 | 360 | 10.000.000 | 360 | 10.100.000 | 360 | 10.200.000 | 360 | 10.400.000 | 360 | 10.600.000 | | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 14 | 360 | | 360 | | 360 | | 360 | | 360 | | | |
| 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 2.000.000 | | 2.050.000 | | 2.100.000 | | 2.200.000 | | 2.300.000 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 14 | 360 | 2.000.000 | 360 | 2.050.000 | 360 | 2.100.000 | 360 | 2.200.000 | 360 | 2.300.000 | | |
| 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 8.000.000 | | 8.050.000 | | 8.100.000 | | 8.200.000 | | 8.300.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 14 | 360 | 8.000.000 | 360 | 8.050.000 | 360 | 8.100.000 | 360 | 8.200.000 | 360 | 8.300.000 | | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 9.600.000 | | 9.706.687,74 | | 9.851.348,55 | | 10.052.360,17 | | 10.288.076,98 | | |
| Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan | Prosentase Koordinasi Kegiatan Trantibbum Yang Terlaksana (%) | 100 | 100 | 9.600.000 | 100 | 9.706.687,74 | 100 | 9.851.348,55 | 100 | 10.052.360,17 | 100 | 10.288.076,98 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Tongas | |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 9.600.000 | | 9.706.687,74 | | 9.851.348,55 | | 10.052.360,17 | | 10.288.076,98 | | |
| Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 3 | 2 | 9.600.000 | 2 | 9.706.687,74 | 2 | 9.851.348,55 | 2 | 10.052.360,17 | 2 | 10.288.076,98 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | | |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 4.800.000 | | 4.853.344,5 | | 4.925.674,55 | | 5.026.180,17 | | 5.144.038,98 | | |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 14 | 4.800.000 | 14 | 4.853.344,5 | 14 | 4.925.674,55 | 14 | 5.026.180,17 | 14 | 5.144.038,98 | | |
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 4.800.000 | | 4.853.343,24 | | 4.925.674 | | 5.026.180 | | 5.144.038 | | |
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 3 | 2 | 4.800.000 | 2 | 4.853.343,24 | 2 | 4.925.674 | 2 | 5.026.180 | 2 | 5.144.038 | | |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 9.000.000 | | 9.100.019,75 | | 9.235.639,26 | | 9.424.087,66 | | 9.645.072,17 | | |
| terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%) | 100 | 100 | 9.000.000 | 100 | 9.100.019,75 | 100 | 9.235.639,26 | 100 | 9.424.087,66 | 100 | 9.645.072,17 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Tongas | |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 9.000.000 | | 9.100.019,75 | | 9.235.639,26 | | 9.424.087,66 | | 9.645.072,17 | | |
| Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 4 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.100.019,75 | 4 | 9.235.639,26 | 4 | 9.424.087,66 | 4 | 9.645.072,17 | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 980 | 1.388 | | 1.388 | | 1.388 | | 1.388 | | 1.388 | | | |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 9.000.000 | | 9.100.019,75 | | 9.235.639,26 | | 9.424.087,66 | | 9.645.072,17 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 980 | 1.388 | 9.000.000 | 1.388 | 9.100.019,75 | 1.388 | 9.235.639,26 | 1.388 | 9.424.087,66 | 1.388 | 9.645.072,17 | | |
| 7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 25.200.000 | | 25.480.055,3 | | 25.859.789,95 | | 26.387.445,46 | | 27.006.202,08 | | |
| terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%) | 100 | 100 | 25.200.000 | 100 | 25.480.055,3 | 100 | 25.859.789,95 | 100 | 26.387.445,46 | 100 | 27.006.202,08 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Tongas | |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 25.200.000 | | 25.480.055,3 | | 25.859.789,95 | | 26.387.445,46 | | 27.006.202,08 | | |
| Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat fasilitasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 4 | 2 | 25.200.000 | 2 | 25.480.055,3 | 2 | 25.859.789,95 | 2 | 26.387.445,46 | 2 | 27.006.202,08 | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | | |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 10.800.000 | | 10.940.055,3 | | 11.140.789,95 | | 11.441.445,46 | | 11.742.202,08 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | 14 | 10.800.000 | 14 | 10.940.055,3 | 14 | 11.140.789,95 | 14 | 11.441.445,46 | 14 | 11.742.202,08 | | |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 14.400.000 | | 14.540.000 | | 14.719.000 | | 14.946.000 | | 15.264.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 4 | 2 | 14.400.000 | 2 | 14.540.000 | 2 | 14.719.000 | 2 | 14.946.000 | 2 | 15.264.000 | | |

*Sumber data : SIPD Renstra Kecamatan Tongas*

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas. Penetapannya berlandaskan pada isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kemampuan pendanaan daerah. Secara eksplisit, Program Prioritas Kecamatan Tongas dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| No | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |
| 1. | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | SAE KERJA |
| | | | 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | SAE KERJA |

*Sumber data : SIPD Renstra Kecamatan Tongas*

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tongas sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tongas**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Tongas | | | | | | | | | |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyaralat | Indeks | 86,75 | 87,50 | 88,25 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 91,00 | |
| 3. | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 4. | IKM Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks | 91,39 | 92,3 | 93,23 | 94,16 | 95,1 | 96,05 | 97,01 | |

*Sumber data : SIPD Renstra Kecamatan Tongas*

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Tongas sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tongas**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | | | | | | | | | | |
| **N I H I L** | | | | | | | | | | | |

*Sumber data : SIPD Renstra Kecamatan Tongas*

# BAB V

# PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan, Program, dan Kebijakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis ini berisikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Kantor Kecamatan Tongas.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Organisasi Kantor Kecamatan Tongas.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah Kebijakan Umum Pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Target Renstra, Evaluasi Efektifitas Kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Program Pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan

kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, dan Konsultasi Publik menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat sekaligus memastikan keterpaduan antarlevel perencanaan pembangunan.

Pendanaan Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Tongas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Tongas.

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Publik.

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian mencakup pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah-langkah korektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai Capaian Kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama :

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjPD) Kecamatan Tongas. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;
2. Evaluasi Tengah Periode (Midterm Review), dilaksanakan pada tahun 2027 untuk menilai capaian Renstra hingga pertengahan periode, serta menjadi dasar untuk

melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan apabila terdapat perubahan lingkungan strategis;

3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi, seperti Laporan Evaluasi Renstra dan Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Bupati, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Program dan Kegiatan dalam Renja tahun berikutnya, sekaligus digunakan sebagai masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra periode berikutnya.

Dengan demikian, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan Visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

CAMAT TONGAS
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN TONGAS

**ROCHMAD WIDIARTO, S.STP, M.A.P.**
Pembina Tingkat I
NIP. 19791017 200012 1 001

PEMERINTAH
KABUPATEN
PROBOLINGGO

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

# 2025-2029

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

ALAMAT : Jl. Ahmad Yani No. 23 Kota Probolinggo

EMAIL : *bakesbangpolkabprob@gmail.com*

WEBSITE : *https://bakesbangpol.probolinggokab.go.id*

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

# RENCANA STRATEGIS

# 2025-2029

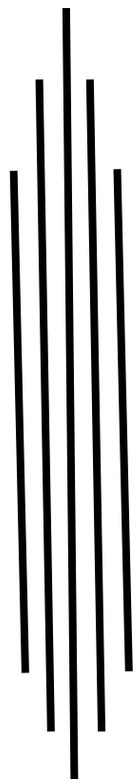

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jln. Ahmad Yani Nomor 23, Email : bakesbangpolkabprob@gmail.com
PROBOLINGGO

**KEPUTUSAN**
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**
**NOMOR : 200.1.4/707/426.204/2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PROBOLINGGO**
**TAHUN 2025-2029**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik, dijabarkan melalui program dan kegiatan yang di tuangkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo selama 5 (lima) tahun;
b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 202-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tetang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarissi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Startegis (Renstra) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercamtum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas;

1. Mengajukan data target dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Mengindetifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target Indikator periode lalu;
3. Melakukan telaah atas relevansi Indikator Kinerja Utama terhadap urusan yang ditangani Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo;

4. Melakukan perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo berdasarkan sasaran dan indikator target Kinerja;
5. Melakukan perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Probolinggo
Pada tanggal : 3 Juli 2025

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos., M.Si.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19701030 199003 1 002

**LAMPIRAN** **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PROBOLINGGO**
NOMOR : 200.1.4/707/426.204/2025
TANGGAL : 3 Juli 2025

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029**

| No. | Kedudukan dalam Tim Kerja | Jabatan dalam Instansi |
|---|---|---|
| 1. | Penanggung Jawab | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo |
| 2. | Ketua | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo |
| 3. | Sekretaris | JF Perencana Ahli Muda |
| 4. | Anggota | 1. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga<br>2. Kepala Bidang Kajian Strategis<br>3. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah<br>4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian<br>5. JF Analis Kebijakan Muda pada Bidang Hubungan Antar Lembanga<br>6. JF Analis Kebijakan Muda pada Bidang Kajian Strategis<br>7. JF Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Hubungan Antar Lembanga<br>8. JF Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Kajian Strategis<br>9. JF Perencana Ahli Pertama |

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos., M.Si.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19701030 199003 1 002

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai landasan operasional dan perencanaan jangka menengah Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai Perangkat Daerah pengampu Urusan Pemerintahan Umum dan fungsi penunjang pemerintahan. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Renstra periode 2025-2029 memuat tantangan strategis yang kompleks, mulai dari dinamika politik, isu-isu kerukunan antar umat, hingga ancaman disinformasi dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, Renstra ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis utama: Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Harmonis, dan Waspada terhadap Potensi Konflik Sosial dan Keagamaan, yang diukur melalui peningkatan Indeks Harmoni Indonesia (IHai) dan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN).

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas Bakesbangpol, yang akan menjadi panduan bagi seluruh jajaran dalam:

1. Menguatkan Sistem Deteksi Dini dan sinergi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS).
2. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
3. Memelihara stabilitas politik dan memfasilitasi peran aktif Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan infrastruktur politik lokal.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi yang kuat antara Bakesbangpol, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh perangkat daerah, dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi panduan yang efektif untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang stabil, berdaulat, dan harmonis.

Probolinggo, September 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO

**H. DODDY NUR BASKORO., S.Sos., M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19701030 199003 1 002

**DAFTAR ISI**


**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**DAFTAR TABEL ..... iii**

**DAFTAR GAMBAR ..... iv**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Dasar Hukum ..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 8

1.4 Sistematika Penulisan ..... 10

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 12**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... 12

2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... 18

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD..... 23

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... 24

2.4.1Tantangan..... 23

2.4.2 Peluang..... 29

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi..... 30

2.6 Penentuan Isu-isu Strategis..... 33

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIKJAKAN..... 40**

3.1 Tujuan Renstra Bakesbangpol ..... 40

3.2 Sasaran Renstra Bakesbangpol..... 45

3.3 Strategi dan Atrah Kebijakan..... 48

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD 2025-2029..... 49

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 45**

4.1 Uraian Program..... 45

4.2 Uraian Kegiatan..... 60

4.3 Uraian Indikator Kinerja Daerah (IKD)..... 75
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 91
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 94
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci..... 99

**BAB V PENUTUP..... 101**

5.1 Kaidah Pelaksanaan..... 102
5.2 Pengendalian dan Evaluasi..... 92

## DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Jumlah Pegawai Bakesbangpol..... | 19 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Sarpras Bakesbangpol..... | 21 |
| Tabel 2.3 | Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan..... | 24 |
| Tabel 2.4 | Indikator Kinerja Kunci (LPPD)..... | 25 |
| Tabel 2.5 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bakesbangpol.. | 27 |
| Tabel 2.6 | Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi..... | 34 |
| Tabel 2.7 | Teknis Menyimpulkan Isu Strategis..... | 37 |
| Tabel 3.1 | Definisi Operasional Tujuan Renstra..... | 44 |
| Tabel 3.2 | Definisi Operasional Sasaran Renstra..... | 45 |
| Tabel 3.3 | Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra ..... | 49 |
| Tabel 3.4 | Penahapan Renstra..... | 54 |
| Tabel 3.5 | Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra..... | 55 |
| Tabel 4.1 | Program Perangkat Daerah..... | 57 |
| Tabel 4.2 | Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan..... | 61 |
| Tabel 4.3 | Indikator Kinerja Daerah..... | 77 |
| Tabel 4.4 | Daftar Sub Kegiatan Prioritas..... | 93 |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Utama..... | 98 |
| Tabel 4.6 | Indikator Kinerja Kunci..... | 101 |

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo ..... 18

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**
**NOMOR : TAHUN 2025**
**TANGGAL : SEPTEMBER 2025**

**BAKESBANGPOL. XXXIII**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025-2029 **dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris)** dan **Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi)** yang telah di lantik pada tanggal 20 Februari 2025, menuangkan visi, misi, dan komitmen politik dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2025 hingga 2029. Dan tahap selanjutnya adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra ini dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Tujuannya adalah untuk menjabarkan secara lebih operasional visi, misi, dan program kerja yang tercantum dalam RPJMD ke dalam target dan kegiatan yang lebih spesifik.

Sejalan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, amanah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 bertujuan untuk menjaga agar program-program pembangunan tidak terhenti dan tetap berjalan sesuai koridor yang ditetapkan, meskipun ada pergantian Kepala Daerah, instruksi ini memberikan arahan yang jelas agar penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dapat selesai tepat waktu, yaitu RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan Kepala Daerah untuk memastikan bahwa visi dan misi Kepala Daerah terpilih dapat diterjemahkan ke dalam dokumen rencana pembangunan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional, sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 yang telah disusun merupakan dokumen induk yang menjadi acuan utama bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru, prioritas pembangunan daerah berubah, oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan RPJMD yang baru. Dokumen tersebut menjadi pedoman dan panduan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Didalam proses penyusunannya, terdapat dinamika perubahan di lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang terus berubah. Secara internal, terdapat perubahan kebijakan pemerintah daerah, dinamika organisasi, dan potensi sumber daya yang ada. Secara eksternal, terdapat isu-isu strategis seperti perkembangan politik, sosial, dan keamanan di tingkat nasional maupun daerah yang harus direspon secara proaktif oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Renstra ini disusun untuk mengantisipasi dan menjawab tantangan serta peluang yang muncul dari perubahan tersebut. Penyusunan Renstra juga didasarkan pada evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode sebelumnya (2020-2024). Analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target-target sebelumnya menjadi masukan penting untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang lebih realistis dan efektif di masa mendatang.

Dengan demikian, Renstra yang disusun bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi merupakan peta jalan yang realistis dan

responsif terhadap kondisi di lapangan, berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan Badan Kesatuan Bangsa untuk meningkatkan kualitas layanan dan program kerjanya sehingga mampu mewujudkan tujuannya untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan bangsa.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 mencakup beberapa peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan-peraturan ini memberikan landasan legal yang kuat untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2);

18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E)
37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029;
38. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029 sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2025-2029;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional rentang waktu tahunan dan lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bakesbangpol
- 2.2 Sumberdaya Bakesbangpol
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bakesbangpol
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Bakesbangpol
  - 2.4.1 Tantangan
  - 2.4.2 Peluang
- 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bakesbangpol
- 2.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029;

3.2 Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029;

3.3 Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029;

3.4 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program;

4.2 Uraian Kegiatan;

4.3 Uraian Indikator Kinerja Daerah;;

4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan dalam BAB XXVIII Bagian Kesatu pasal 400 ayat (1) bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan pada ayat (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada Bagian Kedua pasal 401, susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

**1. Kepala Badan :**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**2. Sekretariat :**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan

memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
e. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

**Sekretariat membawahi :**

**1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
b. Pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
c. Penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
d. Penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
e. Penyiapan bahan data kelembagaan dan analisa jabatan;

f. Penyiapan bahan pelaksanaan, organisasi dan ketatalaksanaan;
g. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**2. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/ anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**3. Bidang Hubungan Antar Lembaga:**

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Hubungan Antar Lembaga dan Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi serta sinkronisasi, penyusunan program dibidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa;
b. Penyusunan program fasilitas pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif, penyelenggaraan pemilu, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;

c. Penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, dan wawasan kebangsaan;
d. Pelaksanaan koordinasi tugas serta program hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa dengan instansi/lembaga terkait;
e. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah;
f. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

**4. Bidang Kajian Strategis:**

Kepala Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Kajian Politik dan Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kajian Strategis mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan data serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
b. Penyusunan program fasilitas pelaksanaan pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
c. Penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
d. Pelaksanaan koordinasi tugas serta program pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi/ lembaga terkait;
e. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;

g. Pelaksanaan peningkatan efektifitas tugas-tugas Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda);
h. Pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama dan deteksi dini serta pengawasan kegiatan orang asing;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**5. Kelompok Jabatan Fungsional:**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator.

Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Sub Koordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah. Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**6. UPT**

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sebagimana diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**
**NOMOR : 14 TAHUN 2022**
**TANGGAL : 18 MEI 2022**

**Gambar. 1**

**Struktur Organisasi**
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
**Kabupaten Probolinggo**

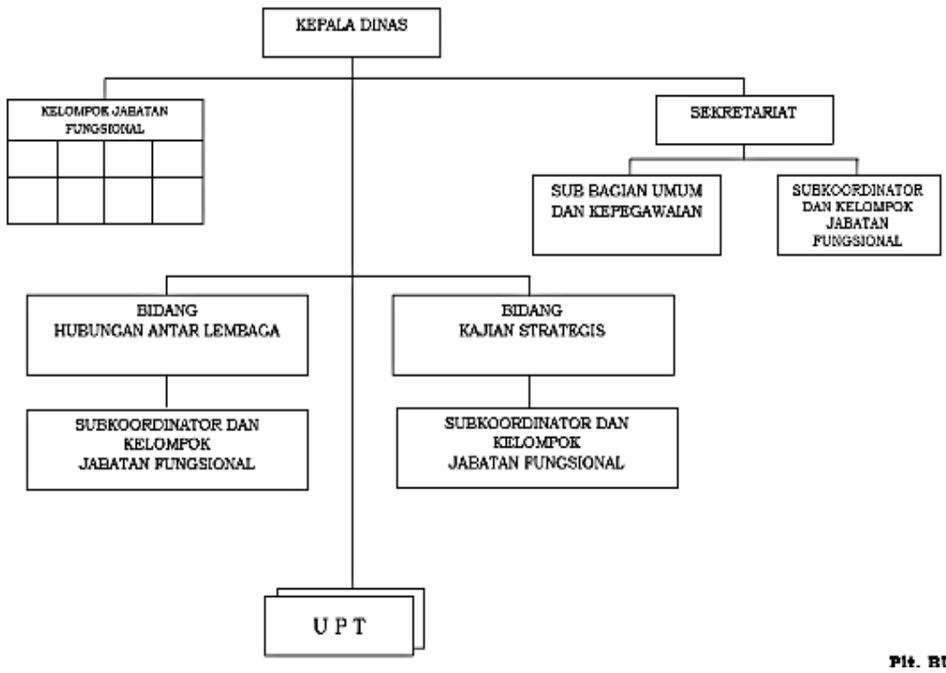


**Plt. BUPATI**

## 2.2 Sumberdaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sesuai dengan struktur organisasi sebagimana Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pejabat Fungsional, Staf PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tidak Tetap.

Adapun sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 (per 30 Juni 2025) adalah sebanyak 28 orang, terdiri dari:

**Tabel. 2.1**
**Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

| No. | Uraian | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| **1.** | **Berdasarkan Jenis Kelamin :** | |
| | - Laki-laki | 19 |
| | - Perempuan | 9 |
| **2.** | **Berdasarkan Status Kepegawaian :** | |
| | - PNS | 16 |
| | - PPPK | 2 |
| | - Pegawai Tidak Tetap | 9 |
| **3.** | **Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan:** | |
| | - S2 | 3 |
| | - S1 | 14 |
| | - D3/DIV | 3 |
| | - SMA/SMK | 8 |
| | - SMP | 0 |
| **4.** | **Berdasarkan Jenjang Eselon :** | |
| | - Eselon II | 1 |
| | - Eselon III.b | 0 |
| | - Eselon III.a | 3 |
| | - Eselon IV/Pejabat Fungsional | 2 |
| | - Staf/Non Eselon | 22 |
| **5.** | **Berdasarkan Pangkat/Golongan :** | |
| | - Pembina Utama Muda | 1 |
| | - Pembina Tingkat I | 0 |
| | - Pembina | 2 |
| | - Penata Tingkat I | 4 |
| | - Penata | 1 |
| | - Penata Muda Tingkat I | 3 |
| | - Penata Muda | 2 |
| | - Pengatur Tingkat I | 4 |
| | - Golongan IX | 1 |
| | - Golongan VII | 1 |
| | **Total** | **28** |

*Sumber Data : Data Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2025*

Berdasarkan Data Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, Bakesbangpol hanya memiliki 1 (satu) orang pejabat fungsional pada Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) Ahli Muda. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan pada jabatan ini kurang optimal, berikut analisisnya :

1. Analis Kebijakan Ahli Muda bertanggung jawab melakukan analisis teknis dan mendalam. Kekurangan SDM mengakibatkan kebijakan sering diputuskan tanpa didukung oleh kajian data, simulasi dampak, dan analisis risiko yang memadai.
2. Kebijakan yang dirumuskan secara terburu-buru atau berdasarkan intuisi (tanpa analisis komprehensif) memiliki risiko tinggi untuk tidak efektif, menimbulkan masalah baru, atau gagal mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Beban Ganda pada Pejabat Lain: Tugas dan fungsi analisis kebijakan (seperti pengumpulan data, perumusan rekomendasi, dan evaluasi) terpaksa dibebankan kepada Fungsional Perencana, yang mungkin tidak memiliki kompetensi khusus dalam analisis kebijakan.
4. Proses kajian dan penyusunan rekomendasi kebijakan menjadi terhambat karena SDM yang ada harus membagi fokus antara tugas fungsional utamanya dengan tugas analisis kebijakan yang sangat membutuhkan waktu.
5. JFAK Ahli Muda adalah jenjang awal bagi seorang analis kebijakan profesional. Kekurangan SDM di jenjang ini menghambat kaderisasi dan regenerasi tenaga ahli kebijakan yang sangat diperlukan untuk keberlanjutan proses pemerintahan.
6. Analis kebijakan diharapkan menjadi motor penggerak inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Kekurangan personil pada jabatan ini membatasi kemampuan Bakesbangpol untuk melakukan eksplorasi ide dan terobosan berbasis kajian.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 23 Kota Probolinggo dan memiliki 1 (satu) bangunan. Sementara itu, untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bakesbangpol sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**
**Jumlah Sarana dan Prasarana**
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

| NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **POMPA** | | |
| 2 | Pompa air | 1 | Unit |
| 3 | **ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR PERORANGAN** | 1 | Unit |
| 4 | Station Wagon | 2 | Unit |
| 5 | Lain-lain Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 1 | Unit |
| 6 | **KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG** | | |
| 7 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 2 | Unit |
| 8 | **KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA** | | |
| 9 | Sepeda Motor | 5 | Unit |
| 10 | **ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG** | | |
| 11 | Kapal Motor | 1 | Unit |
| 12 | **ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS** | | |
| 13 | Kapal Patroli Pantai | 2 | Unit |
| 14 | **PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI** | | |
| 15 | Mesin Gerinda | 1 | Unit |
| 16 | **ALAT UKUR UNIVERSAL** | | Unit |
| 17 | Global Positioning System | 1 | Unit |
| 18 | **ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR** | | |
| 19 | Lemari Kayu | 4 | Unit |
| 20 | Rak Besi | 2 | Unit |
| 21 | Rak Kayu | 2 | Unit |
| 22 | Filing Cabinet Besi | 12 | Unit |
| 23 | Brandkas | 1 | Unit |
| 24 | **ALAT KANTOR LAINNYA** | | |
| 25 | CCTV - Camera Control Television System | 1 | Unit |
| 26 | White Board | 1 | Unit |
| 27 | Alat Penghancur Kertas | 1 | Unit |
| 28 | Mesin Absensi | 2 | Unit |
| 29 | Papan Tulis | 4 | Unit |
| 30 | Brand Kas | 9 | Unit |
| 31 | **MEUBELAIR** | | |
| 32 | Kursi Besi/Metal | 48 | Unit |
| 33 | Meja Rapat | 6 | Unit |
| 34 | Tempat Tidur Besi | 20 | Unit |
| 35 | Kursi Rapat | 45 | Unit |
| 36 | Kursi Tamu | 1 | Unit |
| 37 | Kursi Lipat | 50 | Unit |

| NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | Filling Besi/Metal | 2 | Unit |
| 39 | **ALAT PENGUKUR WAKTU** | | |
| 40 | Lain-lain Alat Pengukur Waktu | 1 | Unit |
| 41 | **ALAT PEMBERSIH** | | |
| 42 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 1 | Unit |
| 43 | **ALAT PENDINGIN** | | |
| 44 | Lemari Es | 1 | Unit |
| 45 | A.C. Window | 6 | Unit |
| 46 | A.C. Split | 2 | Unit |
| 47 | Kipas Angin | 2 | Unit |
| 48 | **ALAT DAPUR** | | |
| 49 | lain-lain Alat Dapur | 2 | Unit |
| 50 | **ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)** | | |
| 51 | Radio | 1 | Unit |
| 52 | Televisi | 4 | Unit |
| 53 | Sound System | 1 | Unit |
| 54 | Camera Video | 3 | Unit |
| 55 | Gordyin/Kray | 1 | Unit |
| 56 | Handtruck Troly Plastics | 2 | Unit |
| 57 | **ALAT PEMADAM KEBAKARAN** | | |
| 58 | Alat Pemadam/Portable | 1 | Unit |
| 59 | **MEJA RAPAT PEJABAT** | | |
| 60 | Meja Operator | 1 | Unit |
| 61 | **KURSI KERJA PEJABAT** | | |
| 62 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | Unit |
| 63 | **KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT** | | Unit |
| 64 | Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 1 | Unit |
| 65 | **LEMARI DAN ARSIP PEJABAT** | | |
| 66 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 3 | Unit |
| 67 | Buffet Kayu | 1 | Unit |
| 68 | Buffet Kaca | 1 | Unit |
| 69 | **PERALATAN STUDIO AUDIO** | | |
| 70 | Telephone Hybrid | 1 | Unit |
| 71 | Microphone/Wireless MIC | 1 | Unit |
| 72 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3 | Unit |
| 73 | Proyektor + Attachment | 2 | Unit |
| 74 | **PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM** | | |
| 75 | Layar Film/Projector | 3 | Unit |
| 76 | **ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE** | | |
| 77 | Telephone (PABX) | 1 | Unit |
| 78 | Handy Talky (HT) | 10 | Unit |
| 79 | Facsimile | 1 | Unit |
| 80 | **ALAT KEAMANAN** | | |

| NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 81 | Lain-lain Alat Keamanan | 6 | Unit |
| 82 | **PERSONAL KOMPUTER** | | |
| 83 | P.C Unit | 4 | Unit |
| 84 | Lap Top | **17** | Unit |
| 85 | **PERALATAN MINI KOMPUTER** | | |
| 86 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 2 | Unit |
| 87 | Lain-Lain Mini Komputer | 2 | Unit |
| 88 | **PERALATAN PERSONAL KOMPUTER** | | |
| 89 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 23 | Unit |
| 90 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 1 | Unit |
| 91 | External/ Portable Hardisk | 5 | Unit |
| 92 | Hard disk Eksternal | 1 | Unit |
| 93 | **PERALATAN JARINGAN** | | |
| 94 | Server | 1 | Unit |
| 95 | **ALAT DETEKSI LAINNYA** | | |
| 96 | alat deteksi lainnya lainnya | 2 | Unit |
| 97 | **ALAT PENDUKUNG PENCARIAN** | | |
| 98 | Tenda | 2 | Unit |
| 99 | **PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA** | | |
| 100 | Genset | 1 | Unit |
| 101 | **PERALATAN PROSES/PRODUKSI** | | |
| 102 | Jet Pump | 2 | Unit |

*Sumber data : Data BMD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2025*

## 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan.

Adapun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**
**Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan IKU**
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024**

| NO. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET (%) | | | | | REALISASI CAPAIAN (%) | | | | | RASIO CAPAIAN (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ***RENSTRA 2018-2023*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase penurunan angka konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) | 0,15 | 0,13 | | | | 100 | 100 | | | | 6,7 | 7,7 | | | |
| 2. | Persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan | 86 | 87 | | | | 100 | 100 | | | | 116,28 | 114,94 | | | |
| ***PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase pelanggaran Ipoleksosbud yang terselesaikan | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | |
| 2. | Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan | | | 95 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 105,26 | 100 | |
| ***RENSTRA 2024-2026*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase pelanggaran Ipoleksosbud yang terselesaikan | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 |

*Sumber data : LKJ-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024*

**Tabel 2.4**
**Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan LPPD**
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024**

| NO. | INDIKATOR KINERJA KUNCI (LPPD) | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah Penanganan Konflik Sosial | NA | 21 | 5 | 15 | 2 |

*Sumber data : LPPD Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-*

Berdasarkan data Tabel 2.4 diatas, trend jumlah penanganan konflik sosial menunjukkan pola yang sangat fluktuatif selama empat tahun terakhir:

- Tahun 2020 (NA): Data tidak tersedia (Not Available/NA). Hal ini disebabkan pada tahun tersebut Kinerja IKK ini belum diukur secara terstruktur pada tahun tersebut.
- Tahun 2021: Jumlah kasus penanganan mencapai angka tertinggi, yaitu 21 kasus. Angka yang tinggi pada tahun pertama pengukuran bisa disebabkan oleh adanya kasus yang terakumulasi atau meningkatnya sensitivitas pelaporan/deteksi dini setelah IKK ini ditetapkan.
- Tahun 2022 : Terjadi penurunan signifikan sebesar 16 kasus (dari 21 menjadi 5). Penurunan tajam ini menunjukkan keberhasilan besar dalam upaya pencegahan atau penanganan konflik pada periode tersebut.
- Tahun 2023 : Jumlah kasus meningkat kembali menjadi 15 kasus (kenaikan 10 kasus dari 2022). Kenaikan ini mengindikasikan bahwa kondisi sosial politik/keamanan kembali menghadapi tantangan yang lebih besar.
- Tahun 2024 : Jumlah penanganan kasus mencapai titik terendah, yaitu hanya 2 kasus. Ini adalah indikator terbaik sepanjang periode, menyiratkan bahwa upaya pencegahan dan pemeliharaan stabilitas daerah sangat efektif, sehingga sangat sedikit konflik yang membutuhkan intervensi formal.

Kesimpulan Analisis:

Kinerja Bakesbangpol dalam mendukung IKK Penanganan Konflik Sosial menunjukkan hasil yang sangat baik pada tahun 2024 dengan jumlah kasus penanganan terendah. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya tingkat stabilitas sosial dan efektivitas tim dalam melakukan pencegahan konflik dini, yang merupakan dukungan fundamental bagi kelancaran seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (LPPD).

# Tabel 2.5
# Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD

| NO. | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | | | | | REALISASI (Rp.) | | | | | RASIO ANTARA RASIO REALISASI DAN ANGGARAN (%) | | | | | RATA_RATA PERTUMBUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ANGGARAN | REALISASI |
| | | - | **7.480.842.084** | **9.777.801.112** | **29.908.677.632** | **61.261.651.694** | - | **6.100.000.552** | **9.030.257.798** | **29.718.171.129** | **60.394.462.505** | **#DIV/0!** | **81,54** | **92,35** | **99,36** | **98,58** | **67.587.871.393** | **64.979.916.981** |
| **1.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | - | **3.239.509.184** | **32.953.612** | **3.033.919.132** | **114.510.196** | - | **2.850.792.374** | **2.801.162.298** | **2.919.738.587** | **3.652.232.130** | **#DIV/0!** | **88,00** | **89,41** | **96,24** | **88,76** | **10.777.885.327** | **9.789.103.969** |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 95.471.600 | 60.546.000 | 135.440.500 | 234.966.000 | - | 75.030.000 | 41.304.700 | 133.571.579 | 211.975.020 | #DIV/0! | 78,59 | 68,22 | 98,62 | 90,22 | 369.780.100 | 320.564.619 |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 2.310.204.584 | 2.317.565.000 | 2.223.692.000 | 2.888.435.000 | - | 2.071.940.996 | 2.065.214.073 | 2.159.158.184 | 2.579.122.153 | #DIV/0! | 89,69 | 89,11 | 97,10 | 89,29 | 7.814.273.251 | 7.156.020.637 |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 28.003.500 | 62.972.000 | - | 14.700.000 | - | 24.892.000 | 55.333.700 | - | 10.714.000 | #DIV/0! | 88,89 | 87,87 | #DIV/0! | 72,88 | 95.875.500 | 83.797.033 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 255.273.800 | 216.142.700 | 202.686.459 | 361.999.316 | - | 206.916.290 | 205.691.668 | 191.306.530 | 316.319.489 | #DIV/0! | 81,06 | 95,16 | 94,39 | 87,38 | 794.769.398 | 709.354.318 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 407.055.700 | 412.427.912 | 414.600.173 | 409.409.880 | - | 356.632.288 | 381.847.857 | 393.748.799 | 335.171.248 | #DIV/0! | 87,61 | 92,59 | 94,97 | 81,87 | 1.370.553.745 | 1.243.952.693 |

| NO. | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | | | | | REALISASI (Rp.) | | | | | RASIO ANTARA RASIO REALISASI DAN ANGGARAN (%) | | | | | RATA_RATA PERTUMBUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ANGGARAN | REALISASI |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 143.500.000 | 63.300.000 | 57.500.000 | 205.000.000 | - | 115.380.800 | 51.770.300 | 41.953.495 | 198.930.220 | #DIV/0! | 80,40 | 81,79 | 72,96 | 97,04 | 332.633.333 | 275.414.668 |
| **2.** | **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **-** | **469.526.600** | **326.050.000** | **439.285.300** | **1.037.524.000** | **-** | **396.809.000** | **222.664.400** | **399.545.300** | **786.345.322** | | **84,51** | **68,29** | **90,95** | **75,79** | **1.580.703.233** | **1.281.133.807** |
| | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | - | 469.526.600 | 326.050.000 | 439.285.300 | 1.037.524.000 | - | 396.809.000 | 222.664.400 | 399.545.300 | 786.345.322 | #DIV/0! | 84,51 | 68,29 | 90,95 | 75,79 | 1.580.703.233 | 1.281.133.807 |
| **3.** | **Progran Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendididkan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik** | **-** | **2.463.704.400** | **5.422.125.400** | **25.755.552.200** | **54.850.722.498** | **-** | **2.301.911.478** | **5.319.606.800** | **25.736.353.062** | **54.783.247.003** | | **93,43** | **98,11** | **99,93** | **99,88** | **51.924.956.166** | **51.618.953.674** |

| NO. | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | | | | | REALISASI (Rp.) | | | | | RASIO ANTARA RASIO REALISASI DAN ANGGARAN (%) | | | | | RATA_RATA PERTUMBUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ANGGARAN | REALISASI |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | - | 2.463.704.400 | 5.422.125.400 | 25.755.552.200 | 54.850.722.498 | - | 2.301.911.478 | 5.319.606.800 | 25.736.353.062 | 54.783.247.003 | #DIV/0! | 93,43 | 98,11 | 99,93 | 99,88 | 51.924.956.166 | 51.618.953.674 |
| **4.** | **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyaraktan** | **-** | **92.200.000** | **92.200.000** | **33.384.000** | **32.806.000** | **-** | **71.100.000** | **55.312.000** | **32.280.000** | **15.337.000** | | **77,11** | **59,99** | **96,69** | **46,75** | **228.719.333** | **163.804.333** |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | - | 92.200.000 | 92.200.000 | 33.384.000 | 32.806.000 | - | 71.100.000 | 55.312.000 | 32.280.000 | 15.337.000 | #DIV/0! | 77,11 | 59,99 | 96,69 | 46,75 | 228.719.333 | 163.804.333 |

| NO. | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | | | | | REALISASI (Rp.) | | | | | RASIO ANTARA RASIO REALISASI DAN ANGGARAN (%) | | | | | RATA_RATA PERTUMBUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ANGGARAN | REALISASI |
| **5.** | **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya** | **-** | **826.391.800** | **403.501.800** | **433.239.000** | **346.765.000** | **-** | **377.067.200** | **327.455.900** | **424.772.880** | **326.724.750** | | **45,63** | **81,15** | **98,05** | **94,22** | **1.778.720.933** | **1.238.204.230** |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | - | 826.391.800 | 403.501.800 | 433.239.000 | 346.765.000 | - | 377.067.200 | 327.455.900 | 424.772.880 | 326.724.750 | #DIV/0! | 45,63 | 81,15 | 98,05 | 94,22 | 1.778.720.933 | 1.238.204.230 |
| **6.** | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | **-** | **389.510.100** | **400.970.300** | **213.298.000** | **879.324.000** | **-** | **102.320.500** | **304.056.400** | **205.481.300** | **830.576.300** | | **26,27** | **75,83** | **96,34** | **94,46** | **1.296.886.400** | **888.716.967** |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | 389.510.100 | 400.970.300 | 213.298.000 | 879.324.000 | - | 102.320.500 | 304.056.400 | 205.481.300 | 830.576.300 | #DIV/0! | 26,27 | 75,83 | 96,34 | 94,46 | 1.296.886.400 | 888.716.967 |

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo menghadapi tantangan dan peluang yang saling berkaitan, terutama dalam menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat di tengah dinamika sosial politik. Tantangan utama berfokus pada isu-isu sosial yang kompleks dan dinamika politik lokal, sementara peluang muncul dari potensi kolaborasi dan inovasi teknologi.

### 2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Isu Sosial dan Politik Lokal yang Kompleks

   Kabupaten Probolinggo memiliki tantangan sosial yang beragam, seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan. Masalah-masalah ini dapat memicu ketidakstabilan sosial, dan Bakesbangpol harus berperan aktif dalam mencegahnya. Selain itu, dinamika politik, termasuk isu politik uang dan partisipasi politik yang rendah di masyarakat, menjadi hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Praktik pelemahan masyarakat sipil dan oportunisme partai politik juga menjadi isu yang perlu diwaspadai.

2. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

   Di era digital, penyebaran berita bohong (hoaks), radikalisme, dan paham intoleransi sangat masif. Bakesbangpol harus bekerja keras untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Kurangnya pemahaman ini bisa menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas

   Pelayanan Bakesbangpol seringkali terkendala oleh keterbatasan anggaran, jumlah personel, dan sarana prasarana yang belum memadai. Hal ini mempengaruhi efektivitas program dan kecepatan respons terhadap isu-isu di

lapangan. Peningkatan kapasitas aparatur Bakesbangpol menjadi esensial untuk menjawab tantangan ini.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

   Bakesbangpol memiliki peluang besar untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kemitraan ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam menjaga kondisi sosial politik yang kondusif. Kolaborasi ini juga bisa memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat, seperti yang sudah dilakukan dalam acara-acara sosial dan budaya.

2. Pemanfaatan Teknologi Digital

   Pengembangan layanan berbasis teknologi digital bisa menjadi solusi efisien untuk meningkatkan pelayanan publik. Bakesbangpol dapat memanfaatkan sistem informasi online, seperti Sistem Informasi Rekomendasi Izin Survei (SI RISTA), untuk mempercepat perizinan dan administrasi. Selain itu, media sosial bisa digunakan sebagai platform untuk sosialisasi wawasan kebangsaan dan edukasi politik, menjangkau audiens yang lebih luas, terutama kaum muda.

3. Optimalisasi Peran di Bidang Kewaspadaan Nasional

   Dengan isu-isu global yang kian kompleks, peran Bakesbangpol dalam kewaspadaan dini, penanganan konflik, dan pengawasan orang asing menjadi semakin krusial. Bakesbangpol dapat memperkuat sistem deteksi dini untuk mencegah potensi konflik sosial dan politik, serta mengoptimalkan kerja sama dengan intelijen dan aparat keamanan. Peran ini memberikan posisi strategis bagi Bakesbangpol untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah.

## 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan perannya. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dari beberapa aspek utama, termasuk kurangnya sumber daya, tantangan sosial politik, dan isu terkait pelayanan publik.

1. Permasalahan Sumber Daya
   - Keterbatasan Sumber Daya Manusia:
     Jumlah personel yang terbatas dan kurangnya motivasi kerja pada beberapa kasus dapat menghambat efektivitas program. Selain itu, kurangnya koordinasi antarpegawai juga menjadi kendala dalam penyebaran informasi dan pelaksanaan tugas.
   - Keterbatasan Sarana dan Prasarana:
     Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti fasilitas kantor atau alat pendukung di lapangan, dapat menghambat kelancaran operasional dan pelayanan.
   - Keterbatasan Anggaran:
     Anggaran yang terbatas dapat membatasi ruang gerak Bakesbangpol dalam melaksanakan program-program strategis, seperti sosialisasi atau kegiatan pembinaan masyarakat.
2. Permasalahan Sosial Politik dan Budaya
   - Rendahnya Kesadaran Politik Masyarakat:
     Masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya budaya politik yang sehat dan tujuan dari pendidikan politik. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, termasuk pemilu.
   - Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi:
     Di era digital, penyebaran berita bohong (hoaks), paham radikal, dan intoleransi menjadi tantangan besar. Bakesbangpol harus bekerja keras untuk membina ideologi dan wawasan kebangsaan di tengah masifnya informasi yang tidak terverifikasi.

- Kurangnya Keterlibatan Masyarakat:

  Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah untuk mewujudkan stabilitas politik dan sosial. Bakesbangpol perlu meningkatkan upaya untuk menggandeng elemen masyarakat sipil.

3. Permasalahan Pelayanan dan Pembinaan

- Kurangnya Sosialisasi:

  Sosialisasi yang dilakukan Bakesbangpol, terutama dalam hal pembinaan dan pendidikan politik, masih dinilai kurang masif dan merata. Akibatnya, informasi terkait hak dan kewajiban politik tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

- Pelayanan yang Belum Optimal:

  Meskipun Bakesbangpol memiliki tugas untuk memfasilitasi urusan pemerintahan, pelayanan yang diberikan, seperti informasi mengenai perundang-undangan, masih belum merata dan optimal.

- Tugas Ganda Aparat Birokrasi:

  Adanya peran ganda dari struktur birokrasi aparat Bakesbangpol bisa memecah fokus, sehingga efektivitas dalam menjalankan tugas pokok dirasa masih kurang.

**Tabel 2.6**
**Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

| No. | Tugas dan Fungsi | Permasalahan | Isu Strategis |
|---|---|---|---|
| 1. | Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | Masifnya penyebaran berita bohong (hoaks) dan konten radikalisme. | Peningkatan ketahanan ideologi Pancasila di era digital. Bakesbangpol harus menjadi benteng utama dalam melawan paham-paham yang mengancam persatuan melalui platform digital dan edukasi. |
| | | Rendahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. | Edukasi wawasan kebangsaan yang efektif dan berkelanjutan. Bakesbangpol perlu merumuskan program yang lebih menarik dan relevan untuk menyasar kaum muda. |

| No. | Tugas dan Fungsi | Permasalahan | Isu Strategis |
|---|---|---|---|
| 2. | Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik | Belum optimalnya sistem deteksi dini potensi konflik sosial. | Penguatan sistem deteksi dini dan respons cepat. Isu strategisnya adalah membangun mekanisme yang solid untuk mencegah konflik sosial agar tidak meluas. |
| | | Kurangnya koordinasi antarlembaga terkait dalam penanganan konflik. | Peningkatan sinergi antarlembaga terkait keamanan dan ketertiban. Bakesbangpol perlu menjadi koordinator utama dalam menjaga stabilitas daerah. |
| 3. | Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan | Keterbatasan anggaran bantuan keuangan bagi partai politik (parpol). | Peningkatan kualitas pendidikan politik melalui bantuan keuangan parpol. Isu strategis ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana parpol untuk edukasi masyarakat. |
| | | Kurang aktifnya peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pembangunan daerah. | Optimalisasi peran ormas sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Bakesbangpol harus mendorong ormas agar lebih berdaya dan berpartisipasi aktif. |
| 4. | Peningkatan Demokrasi dan Pendidikan Politik | Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada. | Peningkatan partisipasi politik yang berkesinambungan. Isu strategis ini berfokus pada upaya berkelanjutan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. |
| | | Adanya isu politik uang dan praktik yang merusak demokrasi. | Penciptaan iklim politik yang bersih dan transparan. Ini adalah isu strategis untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil dan bebas dari praktik ilegal. |
| 5. | Pelayanan dan Administrasi Publik | Layanan perizinan dan administrasi yang masih manual dan lambat. | Digitalisasi layanan publik yang cepat dan efisien. Isu strategis ini menuntut modernisasi birokrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat. |

| No. | Tugas dan Fungsi | Permasalahan | Isu Strategis |
|---|---|---|---|
| | | Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. | Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana. Bakesbangpol perlu menginvestasikan sumber daya untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan kelengkapan fasilitas. |

## 2.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama atau faktor kunci yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi/pemerintah pada masa mendatang. Isu strategis dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dan dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Berikut isu-isu strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**
**Teknis Menyimpulkan Isu Strategis PD**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. Optimalisasi Forum Komunikasi Dini: Bakesbangpol dapat mengaktifkan dan mengoptimalkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Ini adalah peluang untuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat sebagai "mata dan telinga" di tingkat akar rumput, sehingga isu-isu SARA dapat terdeteksi sejak dini sebelum menjadi konflik terbuka.<br>2. Analisis Isu Strategis: Memanfaatkan kewenangan dalam analisis isu strategis, Bakesbangpol dapat memantau media sosial dan platform digital secara intensif. Ini memungkinkan | 1. Rendahnya Toleransi dan Wawasan Kebangsaan: Masih adanya konflik SARA menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang toleransi dan wawasan kebangsaan masih rendah. Bakesbangpol kesulitan menanamkan nilai-nilai ini di tengah maraknya narasi provokatif.<br>2. Penyebaran Hoaks dan Isu SARA di Media Sosial: Media sosial menjadi platform utama penyebaran hoaks dan isu SARA. | Masih terdapatnya konflik SARA | 1. Pemanasan global menyebabkan bencana ekstrem, seperti kekeringan parah atau banjir besar, yang memaksa komunitas di berbagai belahan dunia untuk berpindah mencari tempat yang aman dan layak huni (migrasi iklim)<br>2. Krisis sumber daya alam, khususnya kelangkaan air | Ketidakadilan ekologis dimana dampak negatif kerusakan lingkungan terdistribusi secara tidak merata dan paling merugikan kelompok masyarakat rentan atau marginal misalnya Sengketa lahan dan sumberdaya, pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim | 1. Bencana lingkungan yang bersifat lintas wilayah dan persaingan sumber daya alam antar daerah yang diperparah oleh identitas kelompok (SARA)<br>2. Perebutan lahan pertanian, sumber air, atau akses perikanan di wilayah perbatasan administratif antar kabupaten. Ketika sumber daya ini berkurang (misalnya akibat degradasi lahan atau perubahan | Memperkuat ketahanan sosial dan ideologi di tengah berbagai kerentanan. Isu ini dapat diuraikan ke dalam tiga fokus strategis utama, yaitu :<br>1. Penguatan Deteksi Dini dan Pencegahan Eskalasi Konflik Isu strategis pertama adalah belum optimalnya kemampuan Bakesbangpol dalam mendeteksi dan mencegah isu SARA berkembang menjadi konflik terbuka.<br>2. Revitalisasi Pembinaan Ideologi dan Penguatan Toleraansi |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| identifikasi cepat terhadap narasi provokatif atau hoaks yang berpotensi memicu sentimen SARA, sehingga dapat dilakukan *counter-narasi* dan mediasi segera<br>3. Sinergi Pendidikan Karakter: Bakesbangpol berpeluang besar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan lembaga keagamaan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan Bhinneka Tunggal Ika sejak dini. Ini dilakukan melalui program kurikulum tambahan, lomba, atau seminar yang fokus pada pendidikan multikulturalisme.<br>4. Penguatan Forum Kerukunan: Mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan forum kerukunan lainnya. Bakesbangpol dapat menggunakan FKUB sebagai | Konten yang memecah belah dapat dengan cepat menyebar dan memicu ketegangan di masyarakat. Bakesbangpol menghadapi kesulitan dalam memantau dan melawan arus informasi negatif ini secara efektif<br>3. Kurangnya Peran Tokoh Masyarakat: Beberapa tokoh masyarakat atau tokoh agama mungkin kurang berperan aktif dalam meredam konflik. Terkadang, mereka justru menjadi bagian dari masalah karena kurangnya pemahaman atau terpengaruh isu-isu tertentu | | bersih dan degradasi lahan, diperburuk oleh perubahan iklim global. Kelompok-kelompok radikal sering memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat yang mengalami penderitaan akibat krisis sumber daya. | | iklim), persaingan meningkat sehingga rentan terjadi konflik SARA | Isu strategis kedua adalah rendahnya pemahaman dan praktik toleransi di kalangan masyarakat, yang membuat mereka rentan terhadap provokasi SARA<br>3. Mitigasi Dampak Isu Lintas Sektor (Lingkungan/Ekonomi) yang Disalahgunakan Menjadi SARA Isu strategis ketiga adalah bagaimana mencegah masalah non-SARA (seperti konflik lahan, sumber daya, atau ketidakadilan ekonomi) dibelokkan menjadi isu SARA oleh provokator |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| wadah dialog dan resolusi damai untuk setiap gesekan antar-umat beragama, mengubah potensi konflik menjadi peluang untuk memperkuat persatuan<br>5. Mediasi dan Rekonsiliasi: Setelah konflik SARA terjadi, Bakesbangpol memiliki peluang besar untuk menjadi mediator utama dan memimpin upaya rekonsiliasi. Kewenangan ini memungkinkan Bakesbangpol menyusun dan melaksanakan program pemulihan sosial yang bertujuan mengembalikan kepercayaan antar kelompok dan membangun kembali tatanan sosial yang harmonis. | 4. Keterbatasan Sumber Daya: Bakesbangpol mungkin menghadapi keterbatasan anggaran, personel, atau teknologi untuk melakukan deteksi dini dan intervensi yang cepat saat munculnya potensi konflik SARA | | | | | |

# BAB III

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tujuan adalah adalah gambaran kondisi kinerja masa depan yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang lebih besar dan operasional yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Tujuan menjadi dasar untuk merumuskan sasaran yang lebih operasional dan target indikator kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Perumusan tujuan dalam Renstra sangat penting karena menjadi panduan utama bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan strategis agar semua sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien demi mencapai hasil yang diinginkan.

Adapun visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing”**

Sedangkan misi Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan dalam uraian berikut :

1. **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif (SAE Pemerintahan)**

   Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat sampai pada level pemerintahan desa. Yang dilakukan dengan memastikan kualitas aparatur organisasi pemerintah daerah yang kompeten prestasi, berkinerja dan loyal. Didukung dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. **Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang Kreatif dan Inovatif di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Berbasis Desa dan Komunitas Untuk Menciptakan Lapangan Kerja dan Memberantas Kemiskinan (SAE Ekonomi)**

   Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat memperkuat daya saing daerah terutama dalam meningkatkan nilai investasi, salah satunya melalui revitalisasi BUMD. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui peningkatan produktivitas para pelaku ekonomi maupun sektor-sektor unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, industri, dan perdagangan yang terstandarisasi secara global, berakar pada budaya lokal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. **Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar lainnya yang Terjangkau (SAE Pendidikan dan Kesehatan)**

   Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat dilihat melalui angka Indeks Pembangunan Manusia, yang diukur melalui tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, membutuhkan komitmen dan kerjasama dari para pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melaksanakan program pengembangan karakter (religius dan berbudi pekerti luhur) bersama dengan Lembaga Pendidikan formal dan non formal berbasiskan agama dan kepercayaan secara bertahap dan terukur.

4. **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah Basis Produksi, Daerah Terluar, Daerah Terpencil, serta Perwilayahan Industri secara Merata (SAE Infrastruktur)**

   Infrastruktur yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah akan

mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya. Infrastruktur yang kuat akan mempercepat respon pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan daerah seperti ketimpangan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pemerataan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan lapangan kerja.

5. **Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas (SAE Sosial)**

   Peningkatan akses layanan publik yang inklusif dan responsif harus diwujudkan, khususnya bagi perempuan, masyarakat adat, pemuda, masyarakat rentan dan disabilitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang menegakkan keadilan sosial, dengan mendorong kesetaraan gender dan keberpihakan terhadap kelompok marginal dan rentan dapat diwujudkan baik dalam bentuk program maupun regulasi atau kebijakan. Dengan memberdayakan kelompok rentan, tidak hanya menyelesaikan persoalan ketidaksetaraan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah. Selain itu, dapat pula menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan harmonis, dengan memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama, sehingga terwujud masyarakat yang adil, inklusif, dan damai sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.

Didalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo masuk ke dalam Misi ke-5 yaitu SAE Sosial “Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas” dengan Tujuan Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah Berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal. Untuk mencapai tujuan ini Bakesbangpol berperan dalam Sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya

Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas. Dalam mendukung sasaran tersebut Bakesbangpol berupaya dalam pencapaian Indikator Sasaran ke-4 yaitu Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya).

Berikut definisi operasional variabel Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didalam Renstra 2025-2029 yang menjadi acuan pembangunan daerah, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**

**Definisi Operasional Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo**

| NO | TUJUAN | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER PERHITUNGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Stabilitas dan Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui Pengurangan Konflik di Bidang Ipoleksosbud | Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud | Suatu ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar penurunan jumlah atau intensitas konflik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari suatu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Penurunan ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah/intensitas konflik pada periode awal dan periode akhir | Jumlah konflik thn (n-1) -- Jumlah konflik thn (n) / Jumlah konflik thn (n-1) X 100% | Pihak Ketiga |

## 3.2 Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasarn merupakan gambaran kinerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun sebagai penjabaran dari tujuan dan strategi pembangunan daerah. Sasaran ini menunjukkan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, yang disusun dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berikut definisi operasional variabel Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didalam Renstra 2025-2029 yang menjadi acuan pembangunan daerah, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**
**Definisi Operasional Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo**

| NO | SASARAN | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER PERHITUNGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Harmonis dan Waspada terhadap Potensi Konflik Sosial dan Keagamaan | 1. Indeks Harmoni Indonesia (IHai) | Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan dalam suatu masyarakat, wilayah, atau negara. IHaI biasanya mengukur berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial, budaya, dan religius, dengan tujuan mengevaluasi harmoni sosial dan memastikan integrasi di tengah keberagaman | $IHaI = \sum(ki \cdot Xi)$ | Ditjen Polpum |
| | | 2. Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) | Merupakan alat ukur kewaspadaan nasional yakni suatu kualitas dan kuantitas terhadap kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ancaman ini bisa meliputi berbagai aspek, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. | $\%\ \text{Indikator} = \frac{\text{n Total Indikator}}{\text{n Indikator}} \times 100\%$<br>$\%\ \text{Variabel} = \frac{\text{n \% Indikator}}{\text{n Variabel}}$<br>$\%\ \text{Dimensi} = \frac{\text{n \% Variabel}}{\text{n Dimensi}}$ | Ditjen Polpum |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER PERHITUNGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | 1. Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP adalah hasil penilaian atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Penilaian ini mengukur seberapa efektif dan efisien suatu instansi pemerintah dalam menggunakan anggaran dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan | $\frac{\text{Nilai SAKIP tahun n - Nilai SAKIP tahun n-1}}{\text{Nilai SAKIP tahun n-1}} \times 100\ \%$ | Dokumen LHE AKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah |

# TABEL 3.3
# TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
# RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | | | |
| - Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas | Meningkatnya Stabilitas dan Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui Pengurangan Konflik di Bidang Ipoleksosbud | | Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud (%) | 25,1 | 27,36 | 30,09 | 33,1 | 36,58 | 40,42 | 44,87 | |
| | | Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Harmonis dan Waspada terhadap Potensi Konflik Sosial dan Keagamaan | Indeks Harmoni Indonesia (Indeks) | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | |
| | | | Indeks Kewaspadaan Nasional (Nilai) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

## 3.3 Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam konteks Permendagri Nomor 86 tahun 2017, strategi merupakan bagian penting dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Strategi ini menjadi jembatan antara visi dan misi yang bersifat umum dengan tujuan dan sasaran yang lebih spesifik. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah. Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran selanjutnya menjadi pijakan dalam merumuskan program, kegiatan dan target kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan, maka disusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sedapat mungkin harus mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

## 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan antara tujuan dan sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo.

Di dalam Renstra Bakesbangpol tahun 2025 – 2029 terdapat sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kepala Badan. Untuk mencapai sasaran strategis ini diukur ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Indeks Harmoni Indonesia (IHai) dan Indeks Kewaspadaan Nasional

(IKN). Pengukuran kedua Indeks ini akan menjadi langkah awal yang sangat baik bagi Kabupaten Probolinggo selain saling melengkapi juga memberikan gambaran utuh tentang kondisi sosial di Kabupaten Probolinggo.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arah dan kebijakan sebagai berikut :

**Tujuan I :**

Meningkatnya Stabilitas dan Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui Pengurangan Konflik di Bidang Ipoleksosbud

**Sasaran 1 :**

Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Harmoni dan Waspada terhadap Potensi Konflik Sosial dan Keagamaam

**Indikator Sasaran :**

**1. Indeks Harmoni Indionesia (IHai)**

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) adalah metrik komposit yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengukur tingkat keselarasan, kerukunan, dan kualitas hidup masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Pengukuran ini bertujuan untuk memetakan kondisi di lapangan dan menjadi dasar perumusan kebijakan strategis.

Arah kebijakan untuk meningkatkan Indeks Harmoni Indonesia berfokus pada empat dimensi utama yaitu :

1. Harmoni Ekonomi

   Fokusnya adalah mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

   - Pemerataan Pembangunan :

     Mendorong program pembangunan yang merata di seluruh daerah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
   - Pemberdayaan Ekonomi Lokal :

     Mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan UMKM untuk meningkatkan kemandirian finansial masyarakat.

- Akses Keuangan yang Inklusif :
  Memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, memiliki akses mudah ke layanan perbankan dan permodalan.

2. Harmoni Sosial

   Fokusnya adalah memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik antar kelompok.

   - Penguatan Nilai-Nilai Kemanusiaan:
     Menggalakkan program yang menumbuhkan rasa empati, gotong royong, dan saling tolong-menolong di tengah masyarakat.
   - Komunikasi dan Dialog Publik:
     Membangun forum-forum komunikasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu sosial secara damai.
   - Literasi Digital:
     Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dan waspada terhadap penyebaran hoaks atau isu provokatif yang dapat memicu perpecahan.

3. Harmoni Budaya

   Fokusnya adalah melestarikan keberagaman dan membangun rasa saling menghargai.

   - Promosi dan Pelestarian Budaya Lokal :
     Mendorong kegiatan seni dan budaya yang menampilkan kekayaan tradisi dari berbagai daerah.
   - Edukasi Multikultural:
     Mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya sejak dini.
   - Festival dan Pertunjukan Lintas Budaya:
     Menyelenggarakan acara yang melibatkan partisipasi dari berbagai kelompok etnis dan budaya untuk mempererat hubungan.

4. Harmoni Religius (Keagamaan)

   Fokusnya adalah memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

- Pendidikan Moderasi Beragama:
  Kebijakan ini menjadi salah satu pilar utama yang digagas oleh Kementerian Agama untuk mengembangkan cara pandang dan sikap beragama yang moderat dan toleran.
- Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB):
  Memberikan dukungan dan penguatan peran FKUB sebagai wadah dialog dan mediasi dalam menyelesaikan isu-isu keagamaan di tingkat lokal.
- Penegakan Hukum yang Adil:
  Memastikan penegakan hukum yang tidak diskriminatif terhadap kasus-kasus intoleransi dan penodaan agama.

**2. Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN)**

Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) adalah alat ukur yang menilai tingkat kesiapsiagaan bangsa Indonesia dalam mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah berbagai potensi ancaman terhadap kedaulatan NKRI. IKN mencakup empat dimensi utama: sosial, politik, ekonomi, serta informasi dan keamanan.

Arah kebijakan untuk meningkatkan Indeks Kewaspadaan Nasional melibatkan seluruh sektor dan komponen bangsa, yaitu :

1. Penguatan Kesadaran dan Identitas Bangsa
   - Pendidikan Bela Negara:
     Memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI melalui kurikulum pendidikan formal dan pelatihan non-formal.
   - Literasi Digital:
     Mendorong masyarakat agar lebih kritis dan bijak dalam menyaring informasi, terutama di media sosial, untuk mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, dan konten provokatif yang dapat memecah belah bangsa.
2. Peningkatan Kapasitas Deteksi Dini
   - Penguatan Forum Komunikasi di Daerah:
     Mengoptimalkan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di setiap tingkatan, mulai dari kelurahan hingga provinsi,

sebagai mata dan telinga pemerintah dalam mendeteksi potensi ancaman di lapangan.

- Kerja Sama Intelijen:
  Meningkatkan sinergi dan koordinasi antara intelijen sipil (seperti Kesbangpol) dan intelijen militer/kepolisian (BAIS, BIN, dan Baintelkam Polri) untuk pertukaran data dan analisis ancaman secara cepat.
- Pelatihan Deteksi Dini:
  Mengadakan pelatihan rutin bagi aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan relawan untuk mengenali gejala-gejala awal konflik, radikalisme, atau kejahatan transnasional.

3. Penanganan Ancaman
   - Penegakan Hukum yang Tegas dan Terukur:
     Memastikan aparat penegak hukum bertindak cepat dan profesional dalam menangani setiap ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
   - Manajemen Krisis dan Konflik;
     Pemerintah harus memiliki prosedur dan tim respons cepat yang terlatih untuk menangani situasi darurat dan konflik, dengan meminimalkan korban dan kerugian.
   - Modernisasi Pertahanan dan Keamanan:
     Mengembangkan teknologi dan kemampuan pertahanan, termasuk pertahanan siber, untuk menghadapi ancaman modern yang semakin kompleks.
4. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
   - Inklusi Sosial-Ekonomi:
     Mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang sering menjadi akar masalah dan pemicu konflik. Ini termasuk program pemberdayaan ekonomi di daerah-daerah rawan dan marginal.
   - Pelibatan Aktif Ormas dan Komunitas:
     Mengajak organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga stabilitas dan kewaspadaan di lingkungannya masing-masing.

**TABEL 3.4**
**PENAHAPAN RENSTRA**
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

| TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | TAHAP V |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Penguatan Sistem Deteksi Dini & Data Dasar** | **Optimalisasi Peran Forum & Pengurangan Gesekan** | **Pembentukan Imunitas Sosial & Stabilitas Politik** | **Pengelolaan Isu Sensitif dan Ekstremisme Digital** | **Institusionalisasi & Pencapaian Sasaran Akhir** |
| Indikator Kinerja Kunci (IK) yang Ditingkatkan:<br><br>Deteksi Dini dan Penghitungan Awal IHai dan IKN | Indikator Kinerja Kunci (IK) yang Ditingkatkan:<br><br>Peningkatan Sub-Indikator IHai (Toleransi & Keadilan) dan Peningkatan Jangkauan IKN (Aparat & Tokoh) | Indikator Kinerja Kunci (IK) yang Ditingkatkan:<br><br>Penguatan IHai (Partisipasi & Kerukunan) dan Penerapan IKN (Kewaspadaan Masyarakat) | Indikator Kinerja Kunci (IK) yang Ditingkatkan:<br><br>Sustainabilitas IHai (Kemandirian Kerukunan) dan Pengendalian IKN (Adaptasi Ancaman Baru) | Indikator Kinerja Kunci (IK) yang Ditingkatkan:<br><br>Pencapaian Target IHai dan IKN Akhir Renstra (Tingkat Optimal) |
| - Pemetaan kerawanan konflik sosial, politik, ekonomi, budaya dan keagamaan per desa yang akurat. | - Fasilitasi penyelesaian konflik isu-isu sensitif yang terdeteksi pada tahun 2026.<br><br>- Peningkatan sinergi Forkopimda dalam penegakan hukum terkait intoleransi. | - Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik menjelang tahun politik.<br><br>- Program Kewaspadaan Dini Berbasis Komunitas (melibatkan RT/RW dan tokoh pemuda).<br><br>- Pemberdayaan Ormas sebagai mitra kerukunan dan stabilitas daerah. | - Pembentukan dan pengoperasian Tim Siber untuk memantau dan menangkal berita bohong (*hoax*) dan konten ekstremis.<br><br>- Simulasi Penanganan Konflik (melibatkan BPBD, TNI, Polri).<br><br>- Pengawasan dan fasilitasi Organisasi Asing dan Tenaga Kerja Asing. | - Evaluasi Komprehensif (Survei) IHai dan IKN untuk mengukur pencapaian sasaran.<br><br>- Penyusunan Pedoman Baku (SOP) pencegahan dan penanganan konflik yang berkelanjutan.<br><br>- Perumusan *roadmap* keberlanjutan program kerukunan untuk periode berikutnya. |

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan antara tujuan dan sasaran sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3.5**
**TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA**
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAKESBANGPOL | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Meningkatnya Stabilitas dan Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui Pengurangan Konflik di Bidang Ipoleksosbud | Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan | Peningkatan stabilitas dan ketahanan daerah yang bertujuan untuk memastikan daerah bebas dari potensi ancaman yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. | |
| | | | Peningkatan Kerukunan dan Harmonisasi Sosial yang berfokus pada penguatan modal sosial dan kohesi masyarakat sebagai upaya preventif terhadap perpecahan | |
| | | | Kebijakan Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik yang diarahkan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek politik dan kelembagaan | |

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 4.1 Uraian Program

Program adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama periode lima tahunan (RPJMD). Program-program ini berfungsi untuk mengarahkan kegiatan dan pengalokasian sumber daya guna mengatasi isu strategis, memenuhi kebutuhan daerah, dan memanfaatkan potensi daerah secara terarah dan berkelanjutan. Program-program ini merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode lima tahunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Program adalah penjabaran kebijakan organisasi perangkat daerah yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, berikut disajikan dalam tabel 4.1 yang memuat program, outcome, indikator outcome serta target dan pagu indikatif :

# TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
# PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 6.428.905.871,46 | | 6.500.600.000 | | 6.597.800.000 | | 36.732.800.000 | | 36.891.000.000 | |
| 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.712.208.901,46 | | 3.753.500.000 | | 3.809.500.000 | | 3.887.300.000 | | 3.978.500.000 | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 76,41 | 78,5 | 79,5 | 3.712.208.901,46 | 80,5 | 3.753.500.000 | 81,5 | 3.809.500.000 | 82,5 | 3.887.300.000 | 83,5 | 3.978.500.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | 201.913.100 | | 204.200.000 | | 207.300.000 | | 211.600.000 | | 216.600.000 | |
| Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%) | 90 | 100 | 100 | 201.913.100 | 100 | 204.200.000 | 100 | 207.300.000 | 100 | 211.600.000 | 100 | 216.600.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | 1.920.216.100 | | 1.941.600.000 | | 1.970.600.000 | | 32.010.900.000 | | 32.058.100.000 | |
| Meningkatnya Etika dan Budaya Politik | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase) | 90 | 100 | 100 | 1.920.216.100 | 100 | 1.941.600.000 | 100 | 1.970.600.000 | 100 | 32.010.900.000 | 100 | 32.058.100.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | 134.815.200 | | 136.400.000 | | 138.500.000 | | 141.400.000 | | 144.800.000 | |
| Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas (%) | 90 | 100 | 100 | 134.815.200 | 100 | 136.400.000 | 100 | 138.500.000 | 100 | 141.400.000 | 100 | 144.800.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | 294.906.570 | | 298.200.000 | | 302.700.000 | | 308.900.000 | | 316.200.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) | 90 | 100 | 100 | 294.906.570 | 100 | 298.200.000 | 100 | 302.700.000 | 100 | 308.900.000 | 100 | 316.200.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | 164.846.000 | | 166.700.000 | | 169.200.000 | | 172.700.000 | | 176.800.000 | |
| Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase) | 90 | 100 | 100 | 164.846.000 | 100 | 166.700.000 | 100 | 169.200.000 | 100 | 172.700.000 | 100 | 176.800.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | | **6.428.905.871,46** | | **6.500.600.000** | | **6.597.800.000** | | **36.732.800.000** | | **36.891.000.000** | |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang ditetapkan dalam kegiatan terkait.

Program dan Kegiatan merupakan langkah operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan perlu disusun rencana kerja dan pendanaan. Rencana Kerja terdiri dari sub kegiatan-sub kegiatan dalam lingkup Kegiatan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tekhnik Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam table 4.2 berikut ini :

# TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
## RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | |
| - Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas | Meningkatnya Stabilitas dan Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui Pengurangan Konflik di Bidang Ipoleksosbud | | | | Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud (%) | | |
| | | Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Harmonis dan Waspada terhadap Potensi Konflik Sosial dan Keagamaan | | | Indeks Harmoni Indonesia (Indeks) | | |
| | | | | | Indeks Kewaspadaan Nasional (Nilai) | | |
| | | | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%) | 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis tentang Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan) | 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan) | 8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan) | 8.01.03.2.01.0006 - Pelaksanaan tugas Paskibraka | |
| | | | Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan | | Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas (%) | 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dalam Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan) | 8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan) | 8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | |
| | | | Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat | | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) | 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dalam Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan) | 8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan) | 8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | |
| | | | Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan | | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase) | 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dalam Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan) | 8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan) | 8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | | | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dilaporkan Tepat Waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaporkan Tepat Waktu | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 8.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian PD yang Dilaporkan Tepat Waktu | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 8.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| | | | | Persentase Tingkat Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Persentase Tingkat Pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 8.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 8.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |

## URAIAN DEFINISI OPERASIONAL DAN PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN

| NO. | PROGRAM | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar perubahan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila serta konsep-konsep kebangsaan dalam diri individu atau kelompok masyarakat pada dua titik waktu berbeda. | (Jumlah peserta / jumlah sasaran ) x 100% | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Serangkaian upaya sistematis untuk merancang, mengembangkan, mengesahkan, menyosialisasikan, dan mengawasi implementasi pedoman aturan/regulasi yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta pembentukan karakter kebangsaan di berbagai lapisan masyarakat. | Jumlah dokumen kebijakan yang berhasil dirumuskan/disusun/ ditetapkan dibagi jumlah dokumen kebijakan yang direncanakan X 100% |
| 2. | Progran Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendididkan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Serangkaian upaya terencana dan sistematis yang dilaksanakan untuk memperkuat fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi dan mengoptimalkan peran lembaga pendidikan dalam membentuk warga negara yang partisipatif, beretika, dan memahami nilai-nilai demokrasi melalui peningkatan literasi politik, internalisasi etika berpolitik, dan pembudayaan politik yang sehat | (Jumlah kader partai yang memahami pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik sebelum pra intervensi/ Jumlah kader partai yang memahami pendidikan politik dan penegmbangan etika serta budaya poltik pasca intervensi) x 100% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Serangkaian proses terstruktur dan berkesinambungan untuk merancang, mengembangkan, mengesahkan, menyosialisasikan, membimbing, memantau, dan mengevaluasi implementasi pedoman serta aturan main yang mengatur berbagai aspek kehidupan politik dan demokrasi di daerah yang bertujuan untuk memperkuat fondasi demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, menjamin integritas proses politik, dan menjaga stabilitas politik lokal. | Jumlah dokumen kebijakan yang berhasil dirumuskan/disusun/ ditetapkan dibagi jumlah dokumen kebijakan yang direncanakan X 100% |

| NO. | PROGRAM | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyaraktan | Perubahan rata-rata skor kapasitas Ormas (misalnya dalam aspek manajemen organisasi, penyusunan proposal, pengelolaan keuangan, akuntabilitas, atau pelaksanaan program) yang diukur pada dua titik waktu (sebelum dan sesudah intervensi pemberdayaan). | Jumlah ormas yang ditingkatkan kapasitasnya / jumlah seluruh ormas yang berbadan hukum X 100% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Serangkaian proses yang dilakukan untuk menyusun, merancang, dan menetapkan peraturan, pedoman, atau petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan acuan dalam melakukan pemberdayaan dan pengawasan Ormas | Jumlah dokumen kebijakan yang berhasil dirumuskan/disusun/ ditetapkan dibagi jumlah dokumen kebijakan yang direncanakan X 100% |
| 4. | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | Serangkaian tindakan terencana untuk membuat dan menjalankan kebijakan yang bertujuan meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang ekonomi, sosial dan budaya serta memfasilitasi kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan kegiatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Proses sistematis yang bertujuan untuk menyusun dan menetapkan pedoman, standar, atau peraturan yang menjadi dasar dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan di sektor ekonomi, sosial, dan budaya | Jumlah dokumen kebijakan yang berhasil dirumuskan/disusun/ ditetapkan dibagi jumlah dokumen kebijakan yang direncanakan X 100% |

| NO. | PROGRAM | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Serangkaian upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk merancang, mengembangkan, mengesahkan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi pedoman serta aturan/regulasi yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam mengantisipasi ancaman, serta mengelola dan menyelesaikan konflik sosial di daerah secara efektif dan damai. | Jumlah konflik sosial yang diselesaikan thn-n /jumlah seluruh konflik sosial thn-n X 100% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Proses sistematis yang dilakukan untuk menyusun, merancang, dan menetapkan peraturan, pedoman, atau petunjuk teknis sebagai acuan dalam menjaga stabilitas nasional. Kegiatan ini mencakup identifikasi masalah, analisis risiko, serta perancangan kebijakan yang efektif untuk menghadapi ancaman dan konflik | Jumlah dokumen kebijakan yang berhasil dirumuskan/disusun/ ditetapkan dibagi jumlah dokumen kebijakan yang direncanakan X 100% |
| 6. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Hasil penjumlahan dari 4 komponen penilaian dari Inspektorat yaitu: komponen Perencanaan kinerja, komponen Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Jumlah nilai dari komponen Perencanaan kinerja, komponen Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja adalah dokumen yang disusun sebagai bentuk perencanaan serta mempertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai. | Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun/Dokumen Perencanaan Yang Seharusnya Disusun*100% |
| | | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Merupakan penatausahaan keuangan yang terdiri dari penyediaan administrasi pelaksanaan hingga pelaporan anggaran | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Yang Disusun/Dokumen Administrasi Keuangan Yang Seharusnya Disusun*100% |

| NO. | PROGRAM | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Merupakan kegiatan yang terdiri dari peningkatan disiplin pegawai, pendataan administrasi kepegawaian hingga pendidikan dan bimbingan teknis kepegawaian | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Kedisiplinan Pegawai/Jumlah keseluruhan Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Kedisiplinan Pegawai*100% |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Pendukung layanan perkantoran | Jumlah ketersediaan pendukung layanan perkantoran/Jumlah keseluruhan ketersediaan pendukung layanan perkantoran*100% |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Merupakan seragkaian kegiatan untuk pengadaan BMD untuk menunjang kinerja organisasi | Jumlah BMD Yang Diadakan/ Jumlah BMD Keseluruhan Yang Direncanakan*100 |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Merupakan serangkaian aktivitas penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Yang Diadakan/ Jumlah Keseluruhan Jasa Penunjang Yang Direncanakan |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Merupakan serangkaian aktivitas pemeliharaan BMD | Jumlah BMD yang Diperlihara/ Jumlah Keseluruhan BMD |

### 4.3 Uraian Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Didalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo masuk ke dalam Misi ke-5 yaitu SAE Sosial “Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas” dengan Tujuan Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah Berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal. Untuk mencapai tujuan ini Bakesbangpol berperan dalam Sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas. Dalam mendukung sasaran tersebut Bakesbangpol berupaya dalam pencapaian Indikator Sasaran ke-4 yaitu Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya).

Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo menjadi indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 yang selaras dengan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2025-2029 adalah Kabupaten Probolinggo ***"SAE: Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing”*** mengarah pada pro investasi, menuju masyarakat yang sejahtera. Fokus utama terlihat pada ekonomi, namun visi misi tersebut lebih luas mencakup aspek stabilitas dan keharmonisan sebagai prasyarat pembangunan.

Untuk mencapai masyarakat yang "sejahtera" (ekonomi maju) dan "berdaya saing", Kabupaten Probolinggo memerlukan landasan yang kuat yaitu stabilitas dan kerukunan. Konflik Ipoleksosbud akan menghambat investasi, mengganggu aktivitas ekonomi, dan merusak kohesi sosial, sehingga menghalangi pencapaian kesejahteraan..

**Sinergi yang Jelas:**

- **Visi Misi Bupati Terpilih:** Berfokus pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program startegis "SAE Kebhinekaan" yang berarti stabilitas dan harmoni.

- **Indikator Bakesbangpol (Penurunan Konflik Ipoleksosbud) :** adalah alat ukur langsung untuk menilai seberapa baik kondisi stabilitas dan harmoni masyarakat di Kabupaten Probolinggo.
- **Koneksi:** Ketika konflik Ipoleksosbud menurun, berarti lingkungan menjadi lebih kondusif. Lingkungan yang kondusif ini adalah syarat fundamental bagi pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi, pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan di segala sektor. Tanpa stabilitas, program ekonomi atau sosial apa pun akan sulit berjalan optimal.

Indikator sasaran Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo melalui peran Bakesbangpol sangat selaras dan menjadi fondasi esensial bagi pencapaian visi misi Bupati terpilih. Pengukuran Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya) dan keberhasilan dalam mencapainya, akan membawa dampak signifikan dan positif bagi masyarakat, bukan hanya capaian dalam angka statistik, melainkan cerminan dari kondisi riil di lapangan yang sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari Masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

**Simpulan pencapaian Indeks Ketahanan Daerah :**

- Indikator : Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud
- Target : meningkat dari Baseline 25,10% di tahun 2024 menjadi 44,87% di tahun 2030
- Makna :

  Semakin tinggi persentase penurunan konflik ipoleksosbud, semakin baik. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dan pencegahan konflik di berbagai aspek kehidupan masyarakat berjalan dengan sukses, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis dan stabil

Berikut Indikator Kinerja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo disajikan pada tabel 4.3 :

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH**
**RANCANGAN AKHIR**
**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| **8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | | |
| **I** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud | % | 25,1 | 27,36 | 30,09 | 33,1 | 36,58 | 40,42 | 44,87 | |
| **II** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | | | | | |
| 1. | Indeks Harmoni Indonesia | Indeks | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | |
| 2. | Indeks Kewaspadaan Nasional | Nilai | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |

## TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | 6.428.905.871,46 | | 6.500.600.000 | | 6.597.800.000 | | 36.732.800.000 | | 36.891.000.000 | | |
| 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 3.712.208.901,46 | | 3.753.500.000 | | 3.809.500.000 | | 3.887.300.000 | | 3.978.500.000 | | |
| Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD | Nilai LHE AKIP PD (Nilai) | 76,41 | 79,5 | 3.712.208.901,46 | 80,5 | 3.753.500.000 | 81,5 | 3.809.500.000 | 82,5 | 3.887.300.000 | 83,5 | 3.978.500.000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 71.162.530 | | 75.400.000 | | 75.400.000 | | 97.400.000 | | 100.400.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dilaporkan Tepat Waktu | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | 2 | 71.162.530 | 2 | 75.400.000 | 2 | 75.400.000 | 2 | 97.400.000 | 2 | 100.400.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 43.972.530 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 42.000.000 | | 45.000.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | 10 | 43.972.530 | 10 | 40.000.000 | 10 | 40.000.000 | 10 | 42.000.000 | 10 | 45.000.000 | | |
| 8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 23.390.000 | | 5.400.000 | | 5.400.000 | | 5.400.000 | | 5.400.000 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0 | 4 | 23.390.000 | 4 | 5.400.000 | 4 | 5.400.000 | 4 | 5.400.000 | 4 | 5.400.000 | | |
| 8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3.800.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | 2 | 3.800.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | | |
| 8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.955.818.131,46 | | 2.950.818.131 | | 2.950.818.131 | | 2.950.818.131 | | 2.950.818.131 | | |
| Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaporkan Tepat Waktu | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 2.955.818.131,46 | 1 | 2.950.818.131 | 1 | 2.950.818.131 | 1 | 2.950.818.131 | 1 | 2.950.818.131 | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 19 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2.910.818.131,46 | | 2.910.818.131 | | 2.910.818.131 | | 2.910.818.131 | | 2.910.818.131 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 19 | 20 | 2.910.818.131,46 | 20 | 2.910.818.131 | 20 | 2.910.818.131 | 20 | 2.910.818.131 | 20 | 2.910.818.131 | | |
| 8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | | |
| 8.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | 10.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | | |
| 8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 20.000.000 | | 8.600.000 | | 8.600.000 | | 13.600.000 | | 13.600.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian PD yang Diaporkan Tepat Waktu | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 0 | 242 | 20.000.000 | 240 | 8.600.000 | 240 | 8.600.000 | 240 | 13.600.000 | 240 | 13.600.000 | | |
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | 0 | | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | | | |
| 8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | | |
| 8.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 20.000.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 0 | 242 | 20.000.000 | 240 | 3.600.000 | 240 | 3.600.000 | 240 | 3.600.000 | 240 | 3.600.000 | | |
| 8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 205.000.000 | | 240.333.629 | | 256.333.629 | | 319.633.629 | | 331.333.629 | | |
| Persentase Tingkat Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | 205.000.000 | 4 | 240.333.629 | 4 | 256.333.629 | 4 | 319.633.629 | 4 | 331.333.629 | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000 | | 32.000.000 | | 32.000.000 | | 34.000.000 | | 36.000.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 4 | 30.000.000 | 4 | 32.000.000 | 4 | 32.000.000 | 4 | 34.000.000 | 4 | 36.000.000 | | |
| 8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | 7.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | | |
| 8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 8.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | 8.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | | |
| 8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | | |
| 8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 150.000.000 | | 180.333.629 | | 196.333.629 | | 251.633.629 | | 261.333.629 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 150.000.000 | 12 | 180.333.629 | 12 | 196.333.629 | 12 | 251.633.629 | 12 | 261.333.629 | | |
| 8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | | 40.000.000 | | 50.000.000 | | 45.000.000 | | 115.000.000 | | |
| Persentase Tingkat Pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 45.000.000 | 3 | 115.000.000 | | |
| | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | | 8 | | 4 | | 2 | | 2 | | | |
| 8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0 | | 20.000.000 | | 10.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 8 | 20.000.000 | 4 | 10.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | | |
| 8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 20.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 60.000.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 3 | 60.000.000 | | |
| 8.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 50.000.000 | | |
| Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | | |
| 8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 332.728.240 | | 300.848.240 | | 300.848.240 | | 300.848.240 | | 300.848.240 | | |
| Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 332.728.240 | 12 | 300.848.240 | 12 | 300.848.240 | 12 | 300.848.240 | 12 | 300.848.240 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 48.500.000 | | 48.500.000 | | 48.500.000 | | 48.500.000 | | 48.500.000 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 48.500.000 | 12 | 48.500.000 | 12 | 48.500.000 | 12 | 48.500.000 | 12 | 48.500.000 | | |
| 8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 31.880.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 31.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 252.348.240 | | 252.348.240 | | 252.348.240 | | 252.348.240 | | 252.348.240 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 252.348.240 | 12 | 252.348.240 | 12 | 252.348.240 | 12 | 252.348.240 | 12 | 252.348.240 | | |
| 8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 127.500.000 | | 137.500.000 | | 167.500.000 | | 160.000.000 | | 166.500.000 | | |
| Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 2 | 1 | 127.500.000 | 1 | 137.500.000 | 1 | 167.500.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 166.500.000 | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | 28 | | 28 | | 28 | | 29 | | 31 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | 0 | | 12 | | 12 | | 24 | | 24 | | | |
| 8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 120.000.000 | | 126.500.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | 28 | 110.000.000 | 28 | 110.000.000 | 28 | 110.000.000 | 29 | 120.000.000 | 31 | 126.500.000 | | |
| 8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 24 | 20.000.000 | 24 | 20.000.000 | | |
| 8.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 17.500.000 | | 17.500.000 | | 17.500.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 2 | 1 | 17.500.000 | 1 | 17.500.000 | 1 | 17.500.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | | |
| 8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 30.000.000 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | 201.913.100 | | 204.200.000 | | 207.300.000 | | 211.600.000 | | 216.600.000 | | |
| Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%) | 90 | 100 | 201.913.100 | 100 | 204.200.000 | 100 | 207.300.000 | 100 | 211.600.000 | 100 | 216.600.000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | 201.913.100 | | 204.200.000 | | 207.300.000 | | 211.600.000 | | 216.600.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis tentang Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 2.586 | 2.000 | 201.913.100 | 2.000 | 204.200.000 | 2.000 | 207.300.000 | 2.000 | 211.600.000 | 2.000 | 216.600.000 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 195 | 200 | | 250 | | 300 | | 350 | | 400 | | | |
| 8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 34.922.800 | | 37.209.700 | | 37.209.700 | | 39.509.700 | | 39.509.700 | | |
| Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 195 | 200 | 34.922.800 | 250 | 37.209.700 | 300 | 37.209.700 | 350 | 39.509.700 | 400 | 39.509.700 | | |
| 8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 147.190.300 | | 147.190.300 | | 150.090.300 | | 150.090.300 | | 152.090.300 | | |
| Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 2.586 | 2.000 | 147.190.300 | 2.000 | 147.190.300 | 2.000 | 150.090.300 | 2.000 | 150.090.300 | 2.000 | 152.090.300 | | |
| 8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 19.800.000 | | 19.800.000 | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 25.000.000 | | |
| Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan) | 4 | 4 | 19.800.000 | 4 | 19.800.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 22.000.000 | 4 | 25.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | 1.920.216.100 | | 1.941.600.000 | | 1.970.600.000 | | 32.010.900.000 | | 32.058.100.000 | | |
| Meningkatnya Etika dan Budaya Politik | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase) | 90 | 100 | 1.920.216.100 | 100 | 1.941.600.000 | 100 | 1.970.600.000 | 100 | 32.010.900.000 | 100 | 32.058.100.000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | 1.920.216.100 | | 1.941.600.000 | | 1.970.600.000 | | 32.010.900.000 | | 32.058.100.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dalam Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 100 | 850 | | 850 | | 850 | | 850 | | 850 | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 886 | 140 | | 250 | | 250 | | 350 | | 400 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan) | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 1.862.947.100 | | 1.865.331.000 | | 1.865.320.000 | | 31.880.320.000 | | 31.900.320.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 886 | 140 | 1.862.947.100 | 250 | 1.865.331.000 | 250 | 1.865.320.000 | 350 | 31.880.320.000 | 400 | 31.900.320.000 | | |
| 8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 42.269.000 | | 51.269.000 | | 80.280.000 | | 105.580.000 | | 122.780.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 100 | 850 | 42.269.000 | 850 | 51.269.000 | 850 | 80.280.000 | 850 | 105.580.000 | 850 | 122.780.000 | | |
| 8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan) | 4 | 4 | 15.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 30.000.000 | | |
| 8.01.03.2.01.0006 - Pelaksanaan tugas Paskibraka | | | | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Terlaksananya penugasan paskibraka | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | | |
| 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | 134.815.200 | | 136.400.000 | | 138.500.000 | | 141.400.000 | | 144.800.000 | | |
| Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas (%) | 90 | 100 | 134.815.200 | 100 | 136.400.000 | 100 | 138.500.000 | 100 | 141.400.000 | 100 | 144.800.000 | 8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | 134.815.200 | | 136.400.000 | | 138.500.000 | | 141.400.000 | | 144.800.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dalam Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 130 | 300 | 134.815.200 | 325 | 136.400.000 | 350 | 138.500.000 | 375 | 141.400.000 | 400 | 144.800.000 | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 0 | 300 | | 325 | | 350 | | 375 | | 400 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 108.907.600 | | 108.907.600 | | 109.907.600 | | 110.907.600 | | 112.307.600 | | |
| Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 130 | 300 | 108.907.600 | 325 | 108.907.600 | 350 | 109.907.600 | 375 | 110.907.600 | 400 | 112.307.600 | | |
| 8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 8.907.600 | | 10.492.400 | | 11.592.400 | | 12.492.400 | | 12.492.400 | | |
| Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 0 | 300 | 8.907.600 | 325 | 10.492.400 | 350 | 11.592.400 | 375 | 12.492.400 | 400 | 12.492.400 | | |
| 8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | 18.000.000 | | 20.000.000 | | |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan) | 4 | 4 | 17.000.000 | 4 | 17.000.000 | 4 | 17.000.000 | 4 | 18.000.000 | 4 | 20.000.000 | | |
| 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | 294.906.570 | | 298.200.000 | | 302.700.000 | | 308.900.000 | | 316.200.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) | 90 | 100 | 294.906.570 | 100 | 298.200.000 | 100 | 302.700.000 | 100 | 308.900.000 | 100 | 316.200.000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | 294.906.570 | | 298.200.000 | | 302.700.000 | | 308.900.000 | | 316.200.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dalam Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 170 | 200 | | 250 | | 300 | | 350 | | 400 | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 360 | 300 | | 350 | | 400 | | 450 | | 500 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 219.907.000 | | 219.907.000 | | 223.200.000 | | 225.900.000 | | 229.200.000 | | |
| Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 360 | 300 | 219.907.000 | 350 | 219.907.000 | 400 | 223.200.000 | 450 | 225.900.000 | 500 | 229.200.000 | | |
| 8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 59.999.570 | | 63.293.000 | | 64.500.000 | | 65.500.000 | | 67.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) | 90 | 100 | 294.906.570 | 100 | 298.200.000 | 100 | 302.700.000 | 100 | 308.900.000 | 100 | 316.200.000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | 294.906.570 | | 298.200.000 | | 302.700.000 | | 308.900.000 | | 316.200.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dalam Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 170 | 200 | 294.906.570 | 250 | 298.200.000 | 300 | 302.700.000 | 350 | 308.900.000 | 400 | 316.200.000 | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 360 | 300 | | 350 | | 400 | | 450 | | 500 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 219.907.000 | | 219.907.000 | | 223.200.000 | | 225.900.000 | | 229.200.000 | | |
| Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 360 | 300 | 219.907.000 | 350 | 219.907.000 | 400 | 223.200.000 | 450 | 225.900.000 | 500 | 229.200.000 | | |
| 8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 59.999.570 | | 63.293.000 | | 64.500.000 | | 65.500.000 | | 67.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) | 90 | 100 | 294.906.570 | 100 | 298.200.000 | 100 | 302.700.000 | 100 | 308.900.000 | 100 | 316.200.000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | 294.906.570 | | 298.200.000 | | 302.700.000 | | 308.900.000 | | 316.200.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dalam Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 170 | 200 | 294.906.570 | 250 | 298.200.000 | 300 | 302.700.000 | 350 | 308.900.000 | 400 | 316.200.000 | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 360 | 300 | | 350 | | 400 | | 450 | | 500 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 219.907.000 | | 219.907.000 | | 223.200.000 | | 225.900.000 | | 229.200.000 | | |
| Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 360 | 300 | 219.907.000 | 350 | 219.907.000 | 400 | 223.200.000 | 450 | 225.900.000 | 500 | 229.200.000 | | |
| 8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 59.999.570 | | 63.293.000 | | 64.500.000 | | 65.500.000 | | 67.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan) | 4 | 4 | 10.500.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 17.500.000 | 4 | 20.000.000 | | |
| 8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |

## 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Setiap program dan kegiatan dalam rencana kerja tahunan Bakesbangpol Kabupaten Probolinggomengacu secara eksplisit pada indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran yang tertiang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo. Hal ini untuk memastikan bahwa visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yang diterjemahkan ke dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo terakomodasi secara linier dan implementatif melalui program-program Bakesbangpol.

Dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo berfokus pada penguatan ketahanan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program-program ini dirancang untuk menciptakan kondisi sosial dan politik yang stabil, harmonis, serta aman, yang menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan di sektor lainnya.

1. Program Peningkatan Ketahanan Daerah

   Program utama Bakesbangpol Probolinggo untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah. Subkegiatan yang dilaksanakan meliputi:

   - Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi:
     - Sosialisasi dan Pendidikan Politik:

       Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik, etika berdemokrasi, serta peran aktif dalam pemilihan umum.
     - Fasilitasi Hubungan Partai Politik:

       Mengadakan pertemuan dan forum diskusi dengan partai politik untuk mendorong komunikasi yang sehat, menciptakan iklim politik yang damai, dan mencegah potensi konflik.
   - Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan:
     - Sosialisasi Bela Negara:

Mengadakan pelatihan bela negara, dan kegiatan lain untuk menumbuhkan kesadaran bela negara dan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat, termasuk pelajar, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

- Penguatan Ketahanan Ideologi:
  Melaksanakan forum diskusi dan pembinaan untuk menangkal penyebaran ideologi radikal dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.

- Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial:
  - Deteksi Dini dan Pencegahan Konflik:
    Melakukan pemantauan dan analisis terhadap potensi kerawanan sosial, serta berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengambil langkah-langkah preventif.
  - Mediasi dan Rekonsiliasi:
    Memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi damai dan mencegah eskalasi.

2. Program Peningkatan Kualitas SDM
   Selain fokus pada stabilitas, Bakesbangpol juga berperan dalam meningkatkan kualitas SDM melalui subkegiatan yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat dan kelembagaan.

   - Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas):
     - Pendataan dan Pelaporan Ormas:
       Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap keberadaan ormas untuk memastikan legalitas dan perannya dalam pembangunan.
   - Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika:
     - Sosialisasi Bahaya Narkoba:
       Bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi bahaya narkotika, terutama di lingkungan sekolah dan komunitas pemuda.
     - Fasilitasi Pencegahan:
       Memfasilitasi pembentukan satuan tugas (satgas) dan forum komunikasi anti-narkoba di tingkat desa dan kecamatan.

Adapun nama program Prioritas Pembangunan daerah disajikan dalam table 4.4 berikut ini :

**TABEL 4.4**
**DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | |
| 1. | 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | |
| | | | 8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | |
| 2. | 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat | 8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | |
| | | | 8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | |
| | | | 8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | |

## 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Di dalam Renstra Bakesbangpol tahun 2025–2029 terdapat sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kepala Badan. Untuk mencapai sasaran strategis ini diukur ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Indeks Harmoni Indonesia (IHai) dan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN). Pengukuran kedua Indeks ini akan menjadi langkah awal yang sangat baik bagi Kabupaten Probolinggo selain saling melengkapi juga memberikan gambaran utuh tentang kondisi sosial di Kabupaten Probolinggo.

**1. Indikator Harmoni Indonesia (IHai)**

Target : capaian 6,4 tahun 2024 meningkat menjadi 7,0 di tahun 2030

Maknanya : Semakin tinggi indeks maka tingkat keharmonisan dan kerukunan masyarakat secara umum mengalami peningkatan.

**Implikasinya adalah :**

1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
    - Masyarakat menjadi lebih terbuka dan menerima perbedaan keyakinan, tidak hanya di tingkat individu tetapi juga dalam lingkup komunitas yang lebih besar.
    - Frekuensi konflik antarumat beragama berkurang, dan ada kesediaan yang lebih tinggi untuk mencari solusi damai melalui dialog.
2. Hubungan Sosial yang Lebih Kuat
    - Interaksi dan kohesi sosial antar kelompok masyarakat meningkat. Ini terlihat dari adanya kerja sama yang lebih sering dalam kegiatan sosial, budaya, atau bahkan kegiatan ekonomi, tanpa memandang latar belakang SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

- Sikap saling percaya (trust) antarindividu dan kelompok menjadi lebih baik, yang menjadi dasar kuat untuk membangun gotong royong dan solidaritas.

3. Stabilitas Sosial dan Politik yang Lebih Baik
   - Kondisi sosial-politik di suatu daerah atau negara menjadi lebih stabil dan kondusif. Lingkungan yang harmonis mengurangi potensi kerawanan sosial yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban.
   - Masyarakat merasa bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum semakin efektif dalam memfasilitasi kerukunan dan menyelesaikan potensi konflik dengan adil.

Secara keseluruhan, kenaikan IHaI adalah indikator positif bahwa fondasi sosial bangsa semakin kuat. Hal ini sangat penting karena lingkungan yang harmonis dan stabil merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan program-program pembangunan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun sektor lainnya.

**2. Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN)**

Target : capaian tahun 2024 adalah 74 dan meningkat menjadi 80 di tahun 2030

Maknanya :

mengindikasikan bahwa kemampuan suatu daerah atau bangsa dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman (seperti radikalisme, konflik, dan bencana) menjadi lebih baik. Ini mencerminkan tingkat kesiapsiagaan dan ketahanan yang lebih tinggi.

**Implikasinya :**

Adalah kondisi suatu daerah atau negara menjadi lebih aman, stabil, dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman. Kenaikan indeks ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan.

1. Bagi Pemerintahan dan Keamanan
   - Efektivitas Kebijakan Meningkat:

Kenaikan indeks membuktikan bahwa kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kewaspadaan nasional, seperti sosialisasi bela negara, penanggulangan radikalisme, dan pembinaan ideologi Pancasila, berjalan efektif.

- Pengurangan Beban Keamanan:
  Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, beban aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dapat berkurang. Masyarakat menjadi mitra yang aktif dalam melaporkan atau mencegah potensi ancaman.
- Peningkatan Kepercayaan Publik: Kinerja pemerintah yang berhasil menjaga stabilitas dan keamanan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Hal ini memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

2. Bagi Masyarakat dan Sosial
   - Stabilitas Sosial yang Lebih Kuat:
     Kenaikan IKN mencerminkan berkurangnya potensi konflik sosial. Lingkungan yang stabil memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, bekerja, dan beribadah dengan lebih tenang dan aman.
   - Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran:
     Masyarakat menjadi lebih peka dan proaktif terhadap isu-isu yang berpotensi mengancam persatuan, seperti penyebaran hoaks, radikalisme, atau polarisasi politik. Mereka secara sukarela berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.
   - Tumbuhnya Ketahanan Komunitas:
     Komunitas atau kelompok masyarakat menjadi lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan dari luar. Mereka memiliki mekanisme internal yang lebih baik untuk menyelesaikan perselisihan dan menolak pengaruh-pengaruh negatif.

3. Bagi Ekonomi

- Lingkungan Investasi yang Kondusif:
  Stabilitas politik dan keamanan adalah faktor penentu utama bagi investor, baik domestik maupun asing. Kenaikan IKN mengirimkan sinyal positif bahwa suatu daerah atau negara adalah tempat yang aman dan dapat diandalkan untuk berinvestasi.
- Kelancaran Pembangunan:
  Program-program pembangunan, baik infrastruktur maupun ekonomi, dapat berjalan tanpa hambatan berarti yang disebabkan oleh gejolak sosial atau politik. Hal ini memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang.

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan dalam tabel 4.5 :

**TABEL 4.5**
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | | |
| 2. | Indeks Harmoni Indonesia | Indeks | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | |
| 3. | Indeks Kewaspadaan Nasional | Nilai | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |

## 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk periode 2025–2029, arget utama berfokus pada penguatan ketahanan sosial dan keamanan melalui dua indikator kunci yaitu Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN).

Berikut adalah uraian target kinerja kunci Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo berdasarkan kedua IKK tersebut:

1. Target Kinerja Kunci berdasarkan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)
   Tujuan Strategis: Meningkatkan dan menjaga kerukunan serta toleransi antar umat beragama, etnis, dan golongan di Kabupaten Probolinggo.
   Target Kunci:
   - Peningkatan Skor IHaI:
     Target yang ditetapkan adalah peningkatan skor Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Probolinggo secara progresif setiap tahun, dengan target akhir mencapai skor 7,0 pada tahun 2030.
     Kegiatan yang mendukung pencapaian target ini adalah :
     - Pembinaan Kerukunan Umat Beragama:
       Mengaktifkan kembali peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kabupaten dan kecamatan sebagai wadah dialog dan mediasi.
     - Pendidikan Multikulturalisme:
       Mengadakan sosialisasi dan workshop untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan persatuan di kalangan masyarakat, terutama pemuda dan pelajar.
     - Fasilitasi Mediasi Konflik Sosial:
       Menyediakan mekanisme yang cepat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan atau potensi konflik yang berkaitan dengan isu sosial dan keagamaan.

2. Target Kinerja Kunci berdasarkan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN)

   Tujuan Strategis: Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan deteksi dini serta pencegahan dini terhadap segala potensi ancaman.

   Target Kunci:

   - Peningkatan Skor IKN: Target yang ditetapkan adalah peningkatan Indeks Kewaspadaan Nasional Kabupaten Probolinggo sebesar 1 per tahun untuk periode 2025–2030.

   Kegiatan yang mendukung pencapaian target ini meliputi:

   - Penguatan Deteksi Dini:
     Mengembangkan sistem informasi dan jejaring intelijen di tingkat desa hingga kabupaten untuk memantau pergerakan ideologi radikal, penyebaran hoaks, dan potensi gejolak sosial lainnya.
   - Pemberdayaan Forum Kewaspadaan:
     Mengaktifkan kembali Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan forum sejenis di tingkat desa untuk menjadi "mata dan telinga" pemerintah dalam mendeteksi ancaman di tingkat paling bawah.
   - Sosialisasi Paham Kebangsaan:
     Menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan untuk memperkuat pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan guna menangkal propaganda yang berpotensi memecah belah bangsa.

Secara keseluruhan, target kinerja kunci Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo untuk periode 2025–2023 sangat terfokus pada penciptaan lingkungan yang aman, harmonis, dan tangguh. Kenaikan kedua indeks ini akan menjadi bukti nyata keberhasilan dalam mendukung stabilitas dan kelancaran pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.

Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan dalam tabel 4.6 :

# TABEL 4.6
# NDIKATOR KINERJA KUNCI
# RANCANGAN AKHIR RENSTRA
# PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1. | 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | |
| 2. | Indeks Harmoni Indonesia | positif | Indeks | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | |
| 3. | Indeks Kewaspadaan Nasional | positif | Nilai | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029. Dokumen Renstra ini memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan serta Penetapan Indikator Kinerja pada tahun rencana 2025-2029.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, perangkat daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan daerah dalam kurun lima tahun disiapkan sebagai informasi tentang komitmen politik kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dalam pilkada tahun 2024. perencanaan diuraikan setiap lima tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan cita-cita, harapan, kebijakan yang dituangkan dalam program kepala daerah, termasuk kebijakan yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pengembangan regional, keuangan daerah, dan indikasi kerangka pendanaan pembangunan selama lima tahun. Seiring dengan pemilihan kepala regional simultan di semua wilayah otonom Indonesia pada tahun 2024, kepala daerah

baru dipilih untuk periode dari tahun 2025 hingga 2029, menciptakan desain RPJMD baru untuk periode itu. Visi, misi, dan komitmen politik yang akan dilaksanakan tertuang dalam dokumen RPJMD, termasuk Kabupaten Probolinggo, untuk periode RPJMD 2025 hingga tahun 2029.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan peralihan ini bertujuan untuk menyajikan berbagai hal penting terkait pelaksanaan perencanaan jangka menengah daerah dan menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas pembangunan, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan program. Tata cara pelaksanaan masa peralihan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perlu segera disusun dokumen perencanaan spasial baik di level makro (RTRW) maupun di level mikro (RDTR) untuk melihat relevansi pencapaian target kinerja dan intervensi program dalam RPJMD dengan sebaran data spasial. Dengan demikian strategi pencapaian target dapat lebih spesifik.
2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, agar melakukan koordinasi, baik pada tiap rumpun atau lintas rumpun (*Joint Outcomes*) untuk memastikan pencapaian *outcome* RPJMD berjalan dengan efektif dan efisien;

## 5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Mekanisme pengendalian melibatkan tim dari internal Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo seperti pelaksana urusan perencanaan dan pengawasan serta lembaga lain terkait untuk memantau progres, dengan evaluasi dilakukan setiap semester menggunakan indikator kinerja. Laporan kinerja disampaikan ke DPRD Kabupaten Probolinggo, dan hasil evaluasi menjadi dasar penyesuaian program. Untuk memastikan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025 – 2029 berjalan sesuai rencana, mekanisme

pengendalian dan evaluasi meliputi: a) Jadwal evaluasi periodik, setiap triwulan atau tahunan, dengan laporan kemajuan disampaikan ke DPRD; b) Indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur pencapaian target, seperti capaian pembangunan infrastruktur, peningkatan IPM, atau penurunan angka kemiskinan; c) Mekanisme penyesuaian rencana berdasarkan hasil evaluasi, termasuk revisi program jika diperlukan; d) Pembentukan Tim Pengendali: Tim terdiri dari Bappeda, Inspektorat, dan perangkat daerah dan pihak lain terkait, dengan jadwal rapat bulanan untuk memantau progres dan tindak lanjutnya.

Demikian pedoman transisi, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Probolinggo, September 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos., M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19701030 199003 1 002